

PERBUP RENJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

BUPATI TANGERANG
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI TANGERANG
NOMOR 25 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 20 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menguraikan secara rinci arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah selama 1 (satu) tahun, sebagai penjabaran dari dokumen perencanaan jangka menengah perlu ditetapkan rencana kerja perangkat daerah;

b. bahwa untuk melaksanakan tahapan pembangunan periode Tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Tangerang telah menetapkan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

c. bahwa berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I dan berdasarkan ketentuan Pasal 368 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 perlu diubah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2.Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 118 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tangerang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 304, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7055);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2023 Nomor 39);
7. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2024 Nomor 16);
8. Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2024 Nomor 20);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 20 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2024 Nomor 20), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1) Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan Daerah yang diubah menjadi Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025.

(2) Renja Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
   a. bab I, pendahuluan;
   b. bab II, evaluasi Renja sampai dengan triwulan II tahun berkenaan;
   c. bab III, Renja dan pendanaan Perangkat Daerah;
   d. bab IV, penutup.

(3) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
   a. perubahan Renja Sekretariat Daerah;
   b. perubahan Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
   c. perubahan Renja Inspektorat;
   d. perubahan Renja Badan, terdiri atas:
      1. Badan Pendapatan Daerah;
      2. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
      3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
      4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
   e. perubahan Renja Dinas, terdiri atas:
      1. Dinas Pendidikan;
      2. Dinas Kesehatan;
      3. Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air;
      4. Dinas Tata Ruang dan Bangunan;
      5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
      6. Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman;
      7. Satuan Polisi Pamong Praja;

8.Badan...

8. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
9. Dinas Sosial;
10. Dinas Tenaga Kerja;
11. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
12. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan;
13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
15. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
16. Dinas Perhubungan;
17. Dinas Komunikasi dan Informatika;
18. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;
19. Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata;
20. Dinas Perpustakaan dan Arsip;
21. Dinas Perikanan;
22. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
23. Dinas Perindustrian dan Perdagangan; dan
24. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,

f. perubahan Renja Kecamatan, terdiri atas:
1. Kecamatan Tigaraksa;
2. Kecamatan Cikupa;
3. Kecamatan Panongan;
4. Kecamatan Curug;
5. Kecamatan Legok;
6. Kecamatan Pasar Kemis;
7. Kecamatan Balaraja;
8. Kecamatan Kresek;
9. Kecamatan Kronjo;
10. Kecamatan Mauk;
11. Kecamatan Rajeg;
12. Kecamatan Sepatan;
13. Kecamatan Teluknaga;
14. Kecamatan Cisoka;
15. Kecamatan Pakuhaji;
16. Kecamatan Kosambi;
17. Kecamatan Pagedangan;
18. Kecamatan Jambe;
19. Kecamatan Jayanti;

20.Kecamatan...

20. Kecamatan Kemiri;
21. Kecamatan Sukadiri;
22. Kecamatan Cisauk;
23. Kecamatan Sepatan Timur;
24. Kecamatan Sindang Jaya;
25. Kecamatan Kelapa Dua;
26. Kecamatan Solear;
27. Kecamatan Mekar Baru;
28. Kecamatan Sukamulya; dan
29. Kecamatan Gunung Kaler,

g. perubahan Renja Rumah Sakit Umum Daerah terdiri atas:
   1. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang;
   2. Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja; dan
   3. Rumah Sakit Umum Daerah Pakuhaji.

Pasal 3

Uraian rincian perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa
pada tanggal 9 Juli 2025

BUPATI TANGERANG,

MOCHAMMAD MAESYAL RASYID

Diundangkan di Tigaraksa
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANGERANG,

SOMA ATMAJA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2025 NOMOR 25

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TANGERANG
NOMOR 25 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 20 TAHUN 2024 TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025

1. Sekretariat Daerah

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Penyusunan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Penyusunan Renja Perubahan Sekretariat Daerah ini adalah untuk memberikan gambaran tentang arah dan sasaran program kegiatan guna menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah serta RKPD, dan juga untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam Renja Perangkat Daerah dilakukan dengan mempertimbangkan optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah. Diharapkan Renja Perubahan ini menjadi dasar dan acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah dengan tetap mempertimbangkan prioritas–prioritas program/kegiatan serta pengendalian pelaksanaannya

Proses penyusunan Renja SKPD dimulai dengan mengumpulkan pengolahan data dan informasi. Menganalis gambaran pelayanan SKPD untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi renja SKPD tahun lalu berdasarkan Renstra SKPD yang didasarkan pada penelaahan rancangan awal RKPD. Selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan kepada penelaahan usulan kegiatan masyarakat.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana.

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang

merupakan penjabaran visi, misi dan programkepala daerah. Dari dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan daerah yang tertuang dalam RPJMD ini kemudian dijadikan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
4. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata CaraPerencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tangerang Tahun 2004-2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2004 Nomor 18), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 8 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2017 Nomor 8);
10. Peraturan Bupati Tentang Perubahan Atas Peraturan

Bupati Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2019;

11. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 39 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026, dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis Nasional dan program prioritas Provinsi Tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud : Maksud disusunnya Renja SKPD adalah sebagai pedoman perencanaan atau dasar pelaksanaan kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang serta sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan selama satu tahun dalam kerangka pencapaian Tujuan dan sasaran serta Program Pemerintah Kabupaten Tangerang.

Tujuan : Tujuan dari penyusunan Renja Perubahan SKPD ini adalah sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah dengan tetap mempertimbangkan prioritas–prioritas program/kegiatan serta pengendalian pelaksanaannya dengan mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun lalu. Dengan tersusunnya Renja Perubahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2025 diharapkan akan dapat dijaga keterkaitan antara perencanaan penganggaran dan penyusunan anggaran sehingga terwujud Anggaran Berbasis Kinerja.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Perubahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan susunan sebagai berikut :

KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2024 dan Capaian Renstra Sekretariat Daerah
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang
2.4 Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB IV PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2024 dan Capaian Renstra Sekretariat Daerah

Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2024 juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2024 meliputi kebijakan perencanaan program & kegiatan, dan pelaksanaan rencana program & kegiatan. Berdasarkan program dan kegiatan yang ada di Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang telah melaksanakan sejumlah kegiatan melalui program yang ada dengan dana APBD Tahun 2024 setelah Perubahan yaitu sebesar **Rp. 197.476.555.236** dan Tahun 2025 setelah Perubahan dengan anggaran **Rp. 270.827.011.775** dengan rincian Evaluasi Renja Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 2.1
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Sekretariat Daerah Lingkup Kabupaten
Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang
Periode Pelaksanaan Tahun 2024

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang mengacu pada sasaran RKPD :

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	1. Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan dan Kesra			74,52	160.026.669.041																			SEKRETARIAT DAERAH
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	**Prosentase Hasil Kebijakan yang ditetapkan Indeks Reformasi Hukum Predikat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**	Sedang	2.137.368.513																2.470.100.073			SEKRETARIAT DAERAH
1		**Administrasi Tata Pemerintahan**	**Terwujudnya Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan**	**3**	**1.536.883.329**			**3**	**1.411.903.176**	**12,41%**	**130.385.000**	**20,68%**	**217.227.600**					**20,68%**	**1050241000**	**20,68%**	**1.613.727.495**			SEKRETARIAT DAERAH
(1)		Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	1	736.592.846			1	518.511.946	13,94%	101.057.800	19,79%	143.462.800					19,79%	725083300	19,79%	773.422.488			SEKRETARIAT DAERAH
(2)		Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1	716.067.884			1	809.168.631	10,40%	29.327.200	26,15%	73.764.800					26,15%	282031700	26,15%	751.871.278			SEKRETARIAT DAERAH
(3)		Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	1	84.222.599			1	84.222.599	0,00%	-	0,00%	-					0,00%	43126000	0,00%	88.433.729			SEKRETARIAT DAERAH
2		**Fasilitasi Kerja Sama Daerah**	**Terfasilitasinya Kerjasama yang di tindaklanjuti**	**3**	**600.485.184**			**20**	**600.439.568**	**23,02%**	**126.069.000**	**33,30%**	**182.360.000**					**33,30%**	**547614300**	**33,30%**	**856.372.578**			SEKRETARIAT DAERAH
(4)		Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	1	373.627.422			1	373.627.422	13,37%	48.115.000	28,26%	101.705.000					28,26%	359943000	28,26%	392.308.793			SEKRETARIAT DAERAH
(5)		Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	1						1,19%	1.241.000	2,39%	2.482.000					2,39%	103850600	2,39%	226.372.578			SEKRETARIAT DAERAH
(6)		Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	1	226.857.762			1	226.812.146	91,52%	76.713.000	93,26%	78.173.000					93,26%	83820700	93,26%	237.691.207			SEKRETARIAT DAERAH
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	**Indeks Reformasi Hukum**	**Cukup**	**1.562.228.422**																**1.640.339.843**			SEKRETARIAT DAERAH

3		**Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**	**Tersedianya Produk Hukum Daerah**	**20**	**1.562.228.422**			**10**	**1.880.521.139**	**12,00%**	**209.852.000**	**45,98%**	**804.463.050**					**45,98%**	**1749440600**	**45,98%**	**1.640.339.843**			SEKRETARIAT DAERAH
(7)		Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	20	296.474.500			20	435.750.356	27,56%	95.582.000	54,70%	189.680.000					54,70%	346792600	54,70%	311.298.225			SEKRETARIAT DAERAH
(8)		Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	12	1.100.891.536			10	1.150.702.248	9,32%	102.270.000	54,82%	601.783.050					54,82%	1097824000	54,82%	1.155.936.113			SEKRETARIAT DAERAH
(9)		Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	20	164.862.386			10	294.068.535	3,94%	12.000.000	4,26%	13.000.000					4,26%	304824000	4,26%	173.105.505			SEKRETARIAT DAERAH
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	**Prosentase Hasil Kebijakan yang ditetapkan**	100	48.888.110.695																9.511.065.900			SEKRETARIAT DAERAH
4		**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	**Tersedianya Kebijakan yang ditetapkan**	**100**				**10**	**71.734.879.635**	**20,34%**	**10.041.763.584**	**55,98%**	**27.633.764.304**					**55,98%**	**49367237830**	**55,98%**	9.511.065.900			SEKRETARIAT DAERAH
(10)		Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	1	8.101.271.386			4110	9.037.843.926	12,37%	212.000.000	25,16%	431.261.500					25,16%	1714189560	25,16%	8.389.067.900			SEKRETARIAT DAERAH
(11)		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	1	40.551.979.963			1644		20,85%	9.829.763.584	57,42%	27.068.161.584					57,42%	47139783250	57,42%	765.098.000			SEKRETARIAT DAERAH
(12)		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	1	234.859.346			350	62.462.176.363	0,00%	-	26,17%	134.341.220					26,17%	513265020	26,17%	356.900.000			SEKRETARIAT DAERAH
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	**Prosentase Rumusan kebijakan Perekonomian yang diselesaikan**	100	1.289.744.000			1	234.859.346												2.181.088.962			SEKRETARIAT DAERAH

5		**Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**	**Terwujudnya Perumusan perencanaan ekonomi**	**5**	**1.289.744.000**			**5**	**1.289.372.650**	**21,38%**	**221.915.000**	**44,91%**	**466.078.000**					**44,91%**	**1037749500**	**44,91%**	**1.354.231.200**			SEKRETARIAT DAERAH
(13)		Koordinasi, sinkronisasi, Moitoring, dan evaluasi kebijakan pengelolaan BUMD dan BULD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	3	209.530.000			49	209.530.000	14,66%	53.960.000	47,96%	176.570.000					47,96%	368165000	47,96%	220.006.500			SEKRETARIAT DAERAH
(14)		Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	4	289.728.000			2	288.738.000	30,03%	86.065.000	36,38%	104.270.000					36,38%	286610000	36,38%	304.214.400			SEKRETARIAT DAERAH
(15)		Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	4	790.486.000			4	791.104.650	21,38%	81.890.000	48,37%	185.238.000					48,37%	382974500	48,37%	830.010.300			SEKRETARIAT DAERAH
6		**Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam**	**Terwujudnya Kesesuaian Kebijakan Sumber Daya Alam**	1	-					**0,00%**	-	**61,77%**	**87.620.000**					**61,77%**	**141860000**	**61,77%**	**826.857.762**			SEKRETARIAT DAERAH
(16)		Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan	1						0,00%	-	85,29%	59.225.000					85,29%	69440000	85,29%	373.627.422			SEKRETARIAT DAERAH
(17)		Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan	1						0,00%	-	72,83%	25.840.000					72,83%	35480000	72,83%	226.857.762			SEKRETARIAT DAERAH

(18)		Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan	1						0,00%	-	6,92%	2.555.000					6,92%	36940000	6,92%	226.372.578			SEKRETARIAT DAERAH
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	**Prosentase Jumlah Perangkat Daerah yang patuh terhadap pemenuhan Administrasi Pembangunan**	100	966.578.164																1.014.907.072			SEKRETARIAT DAERAH
7		**Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**	**Tersedianya Dokumen Perangkat Daerah yang patuh terhadap pemenuhan Administrasi Pembangunan**	**1**	**966.578.164**			**2**	**1.105.093.938**	**13,40%**	**140.720.800**	**48,35%**	**507.717.800**					**48,35%**	**1050043950**	**48,35%**	**1.014.907.072**			SEKRETARIAT DAERAH
(19)		Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program	1	633.533.020			1	689.698.020	16,14%	68.040.900	32,24%	135.881.800					32,24%	421439650	32,24%	665.209.671			SEKRETARIAT DAERAH
(20)		Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program	1	136.317.096			1	163.607.096	26,29%	66.104.400	53,14%	133.608.800					53,14%	251417600	53,14%	143.132.951			SEKRETARIAT DAERAH
(21)		Pengelola Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	1	196.728.048			1	251.788.822	1,74%	6.575.500	63,16%	238.227.200					63,16%	377186700	63,16%	206.564.450			SEKRETARIAT DAERAH
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	**Predikat Indeks Tata Kelola Pengelolaan Pengadaan**	Baik	1.001.222.673																1.051.283.807			SEKRETARIAT DAERAH
8		**Pengelolaan Pegadaan Barang dan Jasa**	**Terwujudnya Layanan Pengadaan Barang dan Jasa**	**1**	**1.001.222.673**			**1**	**1.007.566.525**	**21,95%**	**258.709.500**	**56,43%**	**665.281.500**					**56,43%**	**1178891650**	**56,43%**	**1.051.283.807**			SEKRETARIAT DAERAH

(22)		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1	353.400.000			1	245.792.849	21,65%	75.600.000	43,29%	151.200.000					43,29%	349248000	43,29%	371.070.000			SEKRETARIAT DAERAH
(23)		Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	1	338.882.400			1	345.282.400	21,12%	75.072.000	44,49%	158.144.000					44,49%	355426800	44,49%	355.826.520			SEKRETARIAT DAERAH
(24)		Pembinaan dan advokasi pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	40	308.940.273			48	416.491.276	22,78%	108.037.500	75,06%	355.937.500					75,06%	474216850	75,06%	324.387.287			SEKRETARIAT DAERAH
	3. Meningkatkan koordinasi dan Pelayanan Perangkat Daerah	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pemenuhan Administrasi Umum dan Sarana prasarana**	**100**	**60.821.217.339**																**64.162.278.206**		SEKRETARIAT DAERAH
9		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Tersedianya laporan Barang Milik Daerah**	**5**	**118.258.000**			**1**	**105.238.000**	**21,42%**	**20.402.500**	**44,93%**	**42.805.000**					**44,93%**	**95270000**	**44,93%**	**124.170.900**			SEKRETARIAT DAERAH
(25)		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4	52.201.000			4	44.381.000	21,88%	11.802.500	47,46%	25.605.000					47,46%	53954000	47,46%	54.811.050			SEKRETARIAT DAERAH
(26)		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	66.057.000			1	60.857.000	20,82%	8.600.000	41,63%	17.200.000					41,63%	41316000	41,63%	69.359.850			SEKRETARIAT DAERAH
10		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Tersedianya fasilitasi Peningkatan Kapasitas Pegawai**	**162**	**963.119.798**			**152**	**924.060.018**	**0,00%**	**-**	**2,25%**	**26.500.000**					**2,25%**	**1176857100**	**2,25%**	**1.011.275.788**			SEKRETARIAT DAERAH
(27)		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	351.268.098			3	294.008.318	0,00%	-	0,00%	-					0,00%	352175000	0,00%	368.831.503			SEKRETARIAT DAERAH
(28)		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50	611.851.700			50	630.051.700	0,00%	-	3,21%	26.500.000					3,21%	824682100	3,21%	642.444.285			SEKRETARIAT DAERAH
11		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah**	**7**	**21.911.451.370**			**5**	**25.095.559.499**	**9,43%**	**1.715.201.000**	**41,84%**	**7.610.747.076**					**41,84%**	**18188919600**	**41,84%**	**23.007.023.939**			SEKRETARIAT DAERAH

(29)		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	260.005.600			1	479.690.644	0,00%	-	78,98%	545.135.000					78,98%	690201000	78,98%	273.005.880			SEKRETARIAT DAERAH
(30)		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	5.355.640.701			1	8.282.834.321	0,00%	-	76,74%	2.183.617.000					76,74%	2845513500	76,74%	5.623.422.736			SEKRETARIAT DAERAH
(31)		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	537.678.756			1	758.164.455	0,00%	-	93,58%	871.417.550					93,58%	931151600	93,58%	564.562.694			SEKRETARIAT DAERAH
(32)		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	2.210.512.370			1	2.812.116.642	37,09%	915.280.500	47,41%	1.169.775.500					47,41%	2467532000	47,41%	2.321.037.989			SEKRETARIAT DAERAH
(33)		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	199.131.000			1	199.131.000	20,66%	48.992.000	38,19%	90.560.000					38,19%	237150000	38,19%	209.087.550			SEKRETARIAT DAERAH
(34)		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	6.216.343.590			1	6.979.201.590	10,41%	689.984.500	32,71%	2.167.848.000					32,71%	6627830000	32,71%	6.527.160.770			SEKRETARIAT DAERAH
(35)		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	7.132.139.353			3	5.584.420.847	1,39%	60.944.000	13,27%	582.394.026					13,27%	4389541500	13,27%	7.488.746.321			SEKRETARIAT DAERAH
12		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**17**	**4.168.000.000**			**19**	**7.709.500.000**	**0,00%**	**-**	**57,52%**	**4.864.600.000**					**57,52%**	**8456975200**	**57,52%**	**4.376.400.000**			SEKRETARIAT DAERAH
(36)		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	17	4.168.000.000			9	7.709.500.000	0,00%	-	57,52%	4.864.600.000					57,52%	8456975200	57,52%	4.376.400.000			SEKRETARIAT DAERAH
13		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya Kebutuhan Jasa Penunjang Perkantoran**	**4**	**27.103.042.583**			**2**	**27.700.939.233**	**21,18%**	**5.784.360.369**	**42,02%**	**11.477.292.112**					**42,02%**	**27313185776**	**42,02%**	**28.458.194.712**			SEKRETARIAT DAERAH
(38)		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	24	135.535.600			4	75.958.000	9,57%	10.702.500	20,94%	23.405.000					20,94%	111781400	20,94%	142.312.380			SEKRETARIAT DAERAH
(39)		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5	13.455.295.203			6	13.461.295.203	18,85%	2.500.725.369	37,55%	4.982.720.012					37,55%	13269772216	37,55%	14.128.059.963			SEKRETARIAT DAERAH

(40)		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	1.911.414.600			10	2.412.052.600	2,44%	48.202.500	17,68%	349.977.100					17,68%	1979295000	17,68%	2.006.985.330			SEKRETARIAT DAERAH
(41)		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6	11.600.797.180			271	11.751.633.430	26,98%	3.224.730.000	51,21%	6.121.190.000					51,21%	11952337160	51,21%	12.180.837.039			SEKRETARIAT DAERAH
13		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**4**	**5.393.370.800**			**4**	**5.902.237.120**	**10,03%**	**485.420.940**	**33,56%**	**1.624.778.861**					**33,56%**	**4841645060**	**33,56%**	**5.663.039.340**			SEKRETARIAT DAERAH
(42)		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	118	2.287.108.000			118	2.390.234.000	13,01%	236.644.940	38,79%	705.404.861					38,79%	1818574560	38,79%	2.401.463.400			SEKRETARIAT DAERAH
(43)		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4	350.600.000			4	350.600.000	0,00%	-	44,99%	143.982.000					44,99%	320000000	44,99%	368.130.000			SEKRETARIAT DAERAH
(44)		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	962.420.000			5	1.368.560.320	0,00%	-	6,49%	73.926.000					6,49%	1139770500	6,49%	1.010.541.000			SEKRETARIAT DAERAH
(45)		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	13	1.793.242.800			13	1.792.842.800	15,91%	248.776.000	44,87%	701.466.000					44,87%	1563300000	44,87%	1.882.904.940			SEKRETARIAT DAERAH
14		**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**	**Tersedianya Fasiltasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**	**2**	**1.163.974.788**			**3**	**1.413.833.458**	**11,08%**	**157.936.000**	**36,51%**	**520.622.000**					**36,51%**	**1425965000**	**36,51%**	**1.522.173.527**			SEKRETARIAT DAERAH
(46)		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	1	590.038.062			1	839.896.732	14,39%	157.936.000	47,44%	520.622.000					47,44%	1097465000	47,44%	619.539.965			SEKRETARIAT DAERAH
(47)		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	1	573.936.726			1	573.936.726	0,00%	-	0,00%	-					0,00%	328500000	0,00%	602.633.562			SEKRETARIAT DAERAH
(48)		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	0	-																300.000.000			SEKRETARIAT DAERAH

		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase dokumen perencanan dan pelaporan tepat waktu**	100	40.907.689.509																43.227.486.156			SEKRETARIAT DAERAH
15		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**13**	**674.983.794**			**13**	**662.175.294**	26,20%	120.621.500	**66,71%**	**307.098.000**					**66,71%**	**460320000**	**66,71%**	**733.145.155**			SEKRETARIAT DAERAH
(49)		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	262.464.599			7	205.205.099	35,03%	22.766.500	56,45%	36.687.000					56,45%	64994000	56,45%	100.000.000			SEKRETARIAT DAERAH
(50)		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	-					0,00%	-	0,00%	-					0,00%	6466000	0,00%	50.000.000			SEKRETARIAT DAERAH
(51)		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	-					50,00%	6.466.000	50,00%	6.466.000					50,00%	12932000	50,00%	50.000.000			SEKRETARIAT DAERAH
(52)		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	-					50,00%	6.466.000	50,00%	6.466.000					50,00%	12932000	50,00%	50.000.000			SEKRETARIAT DAERAH
(53)		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	-					0,00%	-	50,00%	6.466.000					50,00%	12932000	50,00%	50.000.000			SEKRETARIAT DAERAH
(54)		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	39.070.800			1	32.150.800	47,02%	11.803.000	69,53%	17.453.000					69,53%	25103000	69,53%	41.024.340			SEKRETARIAT DAERAH
(55)		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	373.448.395			5	424.819.395	22,50%	73.120.000	71,87%	233.560.000					71,87%	324961000	71,87%	392.120.815			SEKRETARIAT DAERAH
16		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tersedianya laporan Administrasi keuangan Perangkat Daerah**	**1**	**34.960.862.085**			**2**	**38.271.694.505**	**27,32%**	**11.499.651.642**	**54,74%**	**23.038.810.182**					**54,74%**	**42091179621**	**54,74%**	**36.958.905.189**			SEKRETARIAT DAERAH
(56)		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	152/12	34.773.869.601			152	38.050.280.521	27,34%	11.461.740.142	54,77%	22.961.612.182					54,77%	41927108621	54,77%	36.512.563.081			SEKRETARIAT DAERAH
(57)		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0	-					25,00%	6.883.000	50,00%	13.766.000					50,00%	27532000	50,00%	50.000.000			SEKRETARIAT DAERAH
(58)		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	0	-					25,00%	6.883.000	50,00%	13.766.000					50,00%	27532000	50,00%	50.000.000			SEKRETARIAT DAERAH

		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	0	-					100,00%	7.925.000	100,00%	7.925.000					100,00%	7925000	100,00%	50.000.000			SEKRETARIAT DAERAH
(59)		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0	-					25,00%	5.840.000	50,00%	11.680.000					50,00%	23360000	50,00%	50.000.000			SEKRETARIAT DAERAH
(60)		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1	186.992.484			1	221.413.984	25,00%	10.380.500	54,82%	22.761.000					54,82%	41522000	54,82%	196.342.108			SEKRETARIAT DAERAH
(61)		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	0	-					0,00%	-	20,17%	7.300.000					20,17%	36200000	20,17%	50.000.000			SEKRETARIAT DAERAH
17		**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**Tersedianya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**2**	**5.271.843.630**					**0,00%**	**-**	**45,77%**	**2.654.393.010**					**45,77%**	**5798795362**	**45,77%**	**5.535.435.812**			SEKRETARIAT DAERAH
(62)		Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	.2/12	187.214.682					0,00%	-	0,00%	-					0,00%	210599554	0,00%	196.575.416			SEKRETARIAT DAERAH
(63)		Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	.2/12	5.084.628.948					23,75%	1.327.196.505	47,50%	2.654.393.010					47,50%	5588195808	47,50%	5.338.860.395			SEKRETARIAT DAERAH
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase pemenuhan kegiatan keprotokolan dan komunikasi pimpinan**	100	1.532.501.820																1.609.126.911			SEKRETARIAT DAERAH
18		**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	**Tersedianya Laporan Pelayanan Kedinasan KDH/WKDH dan Pejabat Daerah**	**3**	**1.532.501.820**			**2**	**2.563.645.471**	**19,87%**	**405.521.430**	**48,22%**	**983.791.930**					**48,22%**	**2040362500**	**48,22%**	**1.609.126.911**			SEKRETARIAT DAERAH
(64)		Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	4	470.115.447			3	609.335.447	22,12%	201.618.100	52,46%	478.193.400					52,46%	911495100	52,46%	493.621.219			SEKRETARIAT DAERAH
(65)		Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	4	602.225.449			3	1.102.539.775	17,84%	106.053.230	42,15%	250.552.230					42,15%	594445430	42,15%	632.336.721			SEKRETARIAT DAERAH
(66)		Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	4	460.160.924			3	851.770.249	18,31%	97.850.100	47,72%	255.046.300					47,72%	534421970	47,72%	483.168.970			SEKRETARIAT DAERAH

		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Komponen Pelaporan SAKIP**	11,9	920.007.906																966.008.301			SEKRETARIAT DAERAH
19		**Penataan Organisasi**	**Terwujudnya Perangkat Daerah yang memiliki nilai AKIP berkategori "A"**	**10**	**920.007.906**			**35**	**1.474.828.418**	**4,14%**	**82.703.500**	**56,75%**	**1.133.536.400**					**56,75%**	**1997530430**	**56,75%**	**966.008.301**			SEKRETARIAT DAERAH
(67)		Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	3	294.031.000			2	294.031.000	12,54%	62.289.500	34,49%	171.348.500					34,49%	496761930	34,49%	308.732.550			SEKRETARIAT DAERAH
(68)		Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2	300.545.948			2	489.636.460	3,94%	12.914.000	31,14%	101.968.000					31,14%	327397800	31,14%	215.573.245			SEKRETARIAT DAERAH
(69)		Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	2	325.430.958			2	691.160.958	1,32%	7.500.000	70,11%	397.540.000					70,11%	567024800	70,11%	241.702.506			SEKRETARIAT DAERAH
(70)		Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	0	-					32,51%	116.500.000	90,78%	325.329.800					90,78%	358366300	90,78%	100.000.000			SEKRETARIAT DAERAH
(71)		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	0	-					50,73%	125.799.600	55,39%	137.350.100					55,39%	247979600	55,39%	100.000.000			SEKRETARIAT DAERAH
									Rata-rata capaian kinerja (%)														
									Predikat Kinerja														
Faktor pendorong keberhasilan kinerja;																							
Faktor penghambat pencapaian kinerja;																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya*):																							

2.2. Analisis Kinerja Layanan Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang

Capaian kinerja pelayanan Sekretariat Daerah mengacu kepada uraian tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi, pelaksanaan kapasitas pelayanan Sekretariat Daerah dapat dikategorikan pada 3 (tiga) peran utama yang saling terkait, yaitu sebagai pengambil kebijakan dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan Pembangunan kemasyarakatan serta pelayanan administratif kepada seluruh SKPD. Ketiga kapasitas pelayanan utama tersebut kemudian diuraikan dan dijabarkan kedalam berbagai program dan kegiatan strategis.

Pelayanan sebagai Pengambil Kebijakan

Pelayanan sebagai Pengambil Kebijakan yang ditangani Sekretariat Daerah merupakan unit kerja penentu dalam menyusun dan merumuskan kebijakan pembangunan daerah, administrasi pemerintahan, kemasyarakatan, pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, sarana dan prasarana pemerintah daerah yang diimplementasikan ke dalam rencana strategis Sekretariat Daerah.

Pelayanan sebagai Koordinator Pembangunan Daerah

Pelayanan sebagai koordinator perumusan kebijakan pembangunan daerah, Sekretariat Daerah telah melaksanakan berbagai peran koordinatif yang melibatkan para pemangku kepentingan dalam rangka perencanaan pembangunan daerah seperti koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Tangerang dengan Pemerintah Provinsi Banten dan Pemerintah Pusat, serta koordinasi antara Kecamatan di Kabupaten Tangerang termasuk Desa dalam wilayah Kabupaten Tangerang.

Pelayanan Administratif

Sekretariat Daerah melakukan kajian, telaahan, evaluasi kebijakan, serta penyediaan data dan informasi sebagai bahan masukan dalam rangka penyusunan kebijakan pembangunan daerah dan pelayanan administratif kepada SKPD dilingkup pemerintah daerah

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang

No	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Indikator Tujuan : Nilai SAKIP		**Nilai SAKIP**	Nilai 74.52	Nilai 76.52	Nilai 78.52	Nilai 80.52	**104.30%**	**47.67%**			
1.	**Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			13 Dokumen	12 Dokumen	13 Dokumen	12 Dokumen	**100.00%**	**66.71%**			
1	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			3 Dokumen	2 Dokumen	3 Dokumen	2 Dokumen	100.00%	**56.45%**			
2	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00%	**0.00%**			
3	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00%	**50.00%**			
4	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	**100.00%**	**50.00%**			
5	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	102.63%	**50.00%**			
6	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100.00%	**69.53%**			
7	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	**100.00%**	**71.87%**			
2.	**Tersedianya laporan Administrasi keuangan Perangkat Daerah**			1 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	100.00%	**54.74%**			
8	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			152 orang/12 bulan	152 orang/12 bulan	152 orang/12 bulan	152 orang/12 bulan	100.00%	**54.77%**			
9	Jumlah Dokumen			0 Dokumen	1	1	1	**102.63%**	**50.00%**			

	Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				Dokumen	Dokumen	Dokumen					
10	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00%	**50.00%**			
11	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan			0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	540.00%	**100.00%**			
12	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			0 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	**100.00%**	**50.00%**			
13	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100.00%	**54.82%**			
14	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00%	**20.17%**			
3	**Tersedianya laporan Barang Milik Daerah**			5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	100.00%	**44.93%**			
15	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100.00%	**47.46%**			
16	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100.00%	**41.63%**			
4	**Tersedianya fasilitasi Peningkatan Kapasitas Pegawai**			162 orang	162 orang	162 orang	162 orang	100.00%	**2.25%**			
17	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100.00%	**0.00%**			
18	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			50 orang	50 orang	50 orang	50 orang	**194.74%**	**3.21%**			
5	**Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah**			7 jenis	7 jenis	7 jenis	7 jenis	411.11%	**41.84%**			
19	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	**100.00%**	**78.98%**			
20	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100.00%	**76.74%**			
21	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	83.33%	**93.58%**			
22	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	80.00%	**47.41%**			
23	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100.00%	**38.19%**			
24	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	**100.00%**	**32.71%**			
25	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	72.03%	**13.27%**			
6	**Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			17 unit	17 unit	17 unit	17 unit	100.00%	**57.52%**			

26	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			17 unit	17 unit	17 unit	17 unit	100.00%	**57.52%**			
7	**Tersedianya Kebutuhan Jasa Penunjang Perkantoran**			4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	92.31%	**42.02%**			
27	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			24 laporan	24 laporan	24 laporan	24 laporan	**100.00%**	**20.94%**			
28	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			5 laporan	5 laporan	5 laporan	5 laporan	100.00%	**37.55%**			
29	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	**66.67%**	**17.68%**			
30	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			6 laporan	6 laporan	6 laporan	6 laporan	100.00%	**51.21%**			
8	**Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			4 jenis	4 jenis	4 jenis	4 jenis	100.00%	**33.56%**			
31	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			118 unit	118 unit	118 unit	118 unit	**93.80%**	**38.79%**			
32	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			4 unit	4 unit	4 unit	4 unit	100.00%	**44.99%**			
33	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			5 unit	5 unit	5 unit	5 unit	100.00%	**6.49%**			
34	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi			13 unit	13 unit	13 unit	13 unit	100.00%	**44.87%**			
9	**Tersedianya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**			2 orang	2 orang	2 orang	2 orang	**100.00%**	**45.77%**			
35	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			2 orang/12 bulan	2 orang/12 bulan	2 orang/12 bulan	2 orang/12 bulan	100.00%	**0.00%**			
36	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			2 orang/12 bulan	2 orang/12 bulan	2 orang/12 bulan	2 orang/12 bulan	100.00%	**47.50%**			
10	**Tersedianya Fasiltasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**			2 paket	3 paket	3 paket	3 paket	100.00%	**36.51%**			
37	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan			1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	**100.00%**	**47.44%**			
38	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan			0 paket	1 paket	1 paket	1 paket	**100.38%**	**0.00%**			
11	**Terwujudnya Perangkat Daerah yang memiliki nilai AKIP berkategori A**			10 perangkat daerah	12 perangkat daerah	15 perangkat daerah	18 perangkat daerah	**100.00%**	**56.75%**			
39	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan			3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	**100.00%**	**34.49%**			
40	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana			2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	**100.00%**	**31.14%**			

41	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi			2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	**100.00%**	**70.11%**			
42	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana			0 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100.00%	**90.78%**			
43	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah			0 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100.00%	**55.39%**			
12	**Tersedianya Laporan Pelayanan Kedinasan KDH/WKDH dan Pejabat Daerah**			3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100.00%	**48.22%**			
44	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan			4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	**100.00%**	**52.46%**			
45	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan			4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	100.00%	**42.15%**			
46	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan			4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	116.67%	**47.72%**			
13	**Terwujudnya Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan**			3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	130.29%	**54.71%**			
47	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan			1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100.00%				
48	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan			1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	**100.00%**				
49	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah			1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100.00%				
14	**Tersedianya Kebijakan yang ditetapkan**			1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100.00%	**20.68%**			
50	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual			1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100.00%	**19.79%**			
51	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB			1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	**100.00%**	**26.15%**			
52	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas			1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100.00%	**0.00%**			
15	**Tersedianya Produk Hukum Daerah**			20 dokumen	20 dokumen	20 dokumen	20 dokumen	100.00%	**55.98%**			
53	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun			20 dokumen	20 dokumen	20 dokumen	20 dokumen	**100.00%**	**25.16%**			
54	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum			12 kasus	12 kasus	12 kasus	12 kasus	**100.00%**	**57.42%**			
55	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi			20 dokumen	20 dokumen	20 dokumen	20 dokumen	**100.00%**	**26.17%**			

16	**Terfasilitasinya Kerjasama yang di tindaklanjuti**			3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	**75.00%**	**45.98%**			
56	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri			1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	**100.00%**	**54.70%**			
57	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri			1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100.00%	**54.82%**			
58	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama			1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100.00%	**4.26%**			
17	**Terwujudnya Perumusan perencanaan ekonomi**			5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	100.00%	**33.30%**			
59	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD			3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	**100.00%**	**28.26%**			
60	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian			4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	100.00%	**2.39%**			
61	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil			4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100.00%	**93.26%**			
18	**Terwujudnya Kesesuaian Kebijakan Sumber Daya Alam**			1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100.00%	**50.66%**			
62	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja			1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	**100.00%**				
63	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian			1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100.00%				
64	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan			1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100.00%				
19	**Tersedianya Dokumen Perangkat Daerah yang patuh terhadap pemenuhan Administrasi Pembangunan**			1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	277.08%	**44.91%**			
65	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah			1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	**100.00%**	**47.96%**			
66	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan			1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100.00%	**36.38%**			
67	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan			1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100.00%	**48.37%**			
	Predikat Indeks Tata Kelola Pengelolaan Pengadaan Barang Dan Jasa		**Predikat Indeks Tata Kelola Pengelolaan Pengadaan Barang Dan Jasa**					**75.00%**	**50.66%**			

20	**Terwujudnya Layanan Pengadaan Barang dan Jasa**			1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100.00%	**61.77%**			
68	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa			1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	**100.00%**	**85.29%**			
69	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik			1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	102.63%	**72.83%**			
70	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa			40 orang	100 orang	100 orang	100 orang	100.00%	**6.92%**			

2.3. Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang

Salah satu isu yang sangat mendasar dan sangat ber pengaruh dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang ditahun 2025 adalah:

1. Belum optimalnya implementasi Reformasi Birokrasi di Kabupaten Tangerang.
   Hal ini terlihat dari nilai Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Tangerang Tahun 2023 yang mencapai nilai 76,67 dengan kategori B, sehingga berbagai Upaya harus ditempuh agar reformasi birokrasi dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.
2. Belum optimalnya pemenuhan sarana-prasarana dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah.
   Pengadaan sarana dan prasarana yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan perlu didata dan dikoordinasikan lebih lanjut, sehingga pemanfaatannya lebih optimal dan pemeliharaan pasca gunanya tidak menjadikan kendala bagi pemanfaatannya.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Hasil telaahan terhadap Rancangan Awal RKPD sebagaimana dilihat pada tabel berikut Tabel 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang.

Tabel 2.4
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025

RANCANGAN AWAL 2025							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN 2025						
Program/Sasaran Program dan Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)		Satuan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan 2025	Program/Sasaran Program dan Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)		Satuan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan 2025	
						Target / Rp.							Target / Rp.
		SETDA	Indikator Tujuan : Nilai SAKIP		Nilai	78.52 / 219.420.416.672			SETDA	Indikator Tujuan : Nilai SAKIP		Nilai	78.52 / 270.827.011.775
		ASDA I	Indikator Sasaran : Persentase Capaian Sasaran Strategis OPD dalam lingkup koordinasi Penyelenggaraan pemerintahan dan kesra sesuai dengan target yang ditetapkan		Persen	100			ASDA I	Indikator Sasaran : Persentase Capaian Sasaran Strategis OPD dalam lingkup koordinasi Penyelenggaraan pemerintahan dan kesra sesuai dengan target yang ditetapkan		Persen	100
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT							PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT						
Sasaran Program :			Capaian Program (Indikator Kinerja Program):				Sasaran Program :			Capaian Program (Indikator Kinerja Program):			
1.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan	TAPEM		Predikat Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Predikat	Tinggi	1.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan	TAPEM		Predikat Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Predikat	Tinggi
1. Administrasi Tata Pemerintahan							1. Administrasi Tata Pemerintahan						
Sasaran Kegiatan :			Keluaran :				Sasaran Kegiatan :			Keluaran :			
	Tersusunnya LPPD Tepat Waktu			Terwujudnya Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan	Dokumen	3 / 851,475,800		Tersusunnya LPPD Tepat Waktu			Terwujudnya Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan	Dokumen	3 / 788.356.000
			Hasil :							Hasil :			
				Prosentase Dokumen Administrasi Pemerintahan	Persen	100					Prosentase Dokumen Administrasi Pemerintahan	Persen	100
1	Penataan Administrasi Pemerintahan	Tapem	Keluaran :	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Dokumen	1 / 560,433,000	1	Penataan Administrasi Pemerintahan	Tapem	Keluaran :	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Dokumen	1 / 501.045.000
2	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Tapem	Keluaran :	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Dokumen	1 / 198,722,800	2	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Tapem	Keluaran :	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Dokumen	1 / 218.625.000
3	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Tapem	Keluaran :	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Dokumen	1 / 92,320,000	3	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Tapem	Keluaran :	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Dokumen	1 / 68.686.000
2. Fasilitasi Kerjasama Daerah							2. Fasilitasi Kerjasama Daerah						
Sasaran Kegiatan :			Keluaran :				Sasaran Kegiatan :			Keluaran :			
	Tersedianya Kerjasama Daerah	-		Terfasilitasinya Kerjasama yang di tindaklanjuti	Dokumen	3 / 696,466,000		Tersedianya Kerjasama Daerah	-		Terfasilitasinya Kerjasama yang di tindaklanjuti	Dokumen	3 / 920.486.000
			Hasil :							Hasil :			
				Prosentase MOU dan PKS yang di tindaklanjuti	Persen	100					Prosentase MOU dan PKS yang di tindaklanjuti	Persen	100

RANCANGAN AWAL 2025								HASIL ANALISIS KEBUTUHAN 2025							
Program/Sasaran Program dan Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)		Satuan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan 2025		Program/Sasaran Program dan Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)		Satuan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan 2025	
						Target	Rp.							Target	Rp.
4	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Tapem	Keluaran :	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Dokumen	1	311,389,000	4	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Tapem	Keluaran :	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Dokumen	1	262.102.000
5	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Tapem	Keluaran :	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Dokumen	1	236,044,000	5	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Tapem	Keluaran :	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Dokumen	1	167.828.000
6	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Tapem	Keluaran :	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Laporan	1	149,033,000	6	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Tapem	Keluaran :	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Laporan	1	490.556.000
2.	Meningkatnya Kualitas Produk Hukum Daerah	HUKUM		Indeks Reformasi Hukum	Predikat	Baik		2.	Meningkatnya Kualitas Produk Hukum Daerah	HUKUM		Indeks Reformasi Hukum	Predikat	Baik	
3. Fasilitasi dan Koordinasi Hukum								**3. Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**							
Sasaran Kegiatan :			**Keluaran :**					**Sasaran Kegiatan :**			**Keluaran :**				
	Terpenuhinya Produk Hukum Daerah			Tersedianya Produk Hukum Daerah	Dokumen	20	2,003,659,570		Terpenuhinya Produk Hukum Daerah			Tersedianya Produk Hukum Daerah	Dokumen	20	2.050.605.570
			Hasil :								**Hasil :**				
				Prosentase Ketersediaan Produk Hukum Daerah	Persen	100						Prosentase Ketersediaan Produk Hukum Daerah	Persen	100	
7	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Hukum	Keluaran :	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Dokumen	20	426,794,000	7	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Hukum	Keluaran :	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Dokumen	20	417.180.000
8	Fasilitasi Bantuan Hukum	Hukum	Keluaran :	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Kasus	12	1,136,911,570	8	Fasilitasi Bantuan Hukum	Hukum	Keluaran :	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Kasus	12	1.247.121.570
9	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Hukum	Keluaran :	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Dokumen	20	439,954,000	9	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Hukum	Keluaran :	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Dokumen	20	386.304.000

RANCANGAN AWAL 2025								HASIL ANALISIS KEBUTUHAN 2025							
Program/Sasaran Program dan Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)		Satuan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan 2025		Program/Sasaran Program dan Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)		Satuan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan 2025	
						Target	Rp.							Target	Rp.
Sasaran Program :			**Capaian Program (Indikator Program) :**					**Sasaran Program :**			**Capaian Program (Indikator Program) :**				
3	Meningkatkan Koordinasi Kesejahteraan Rakyat	KESRA		Prosentase Hasil Kebijakan Yang ditetapkan	Persen	100	92,252,050,788	3	Meningkatkan Koordinasi Kesejahteraan Rakyat	KESRA		Prosentase Hasil Kebijakan Yang ditetapkan	Persen	100	
4. Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat								**4. Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**							
Sasaran Kegiatan :			**Keluaran :**					**Sasaran Kegiatan :**			**Keluaran :**				
				Tersedianya Kebijakan yang ditetapkan	Dokumen	1	92,252,050,788					Tersedianya Kebijakan yang ditetapkan	Dokumen	1	138.869.580.478
			Hasil :								**Hasil :**				
				Prosentase Hasil Kebijakan Yang ditetapkan	Persen	100						Prosentase Hasil Kebijakan Yang ditetapkan	Persen	100	
10	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Kesra	Keluaran :	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi PengelolaanBina Mental Spiritual	Dokumen	1	8,441,850,100	10	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Kesra	Keluaran :	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi PengelolaanBina Mental Spiritual	Dokumen	1	9.354.494.500
11	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Kesra	Keluaran :	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Dokumen	1	83,302,905,688	11	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Kesra	Keluaran :	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Dokumen	1	128.707.137.678
12	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Kesra	Keluaran :	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Dokumen	1	507,295,000	12	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Kesra	Keluaran :	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Dokumen	1	807.948.300

RANCANGAN AWAL 2025							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN 2025						
Program/Sasaran Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan 2025			Program/Sasaran Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan 2025		
				Target	Rp.						Target	Rp.	
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN							**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**						
Sasaran Program :		**Capaian Program (Indikator Program) :**					**Sasaran Program :**		**Capaian Program (Indikator Program) :**				
4 Meningkatkan kualitas kebijakan perekonomian		Prosentase Rumusan kebijakan Perekonomian yang diselesaikan	Persen	100			4 Meningkatkan kualitas kebijakan perekonomian		Prosentase Rumusan kebijakan Perekonomian yang diselesaikan	Persen	100		
5. Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian							**5. Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**						
Sasaran Kegiatan :		**Keluaran :**					**Sasaran Kegiatan :**		**Keluaran :**				
Terselesaikannya Perumusan Kebijakan di Bidang Perekonomian		Terwujudnya Perumusan perencanaan ekonomi	Dokumen	5	1,439,425,400		Terselesaikannya Perumusan Kebijakan di Bidang Perekonomian		Terwujudnya Perumusan perencanaan ekonomi	Dokumen	5	1.238.663.200	
		Hasil :							**Hasil :**				
		Prosentase Perumusan Kebijakan Bidang Perekonomian yang diselesaikan	Persen	100					Prosentase Perumusan Kebijakan Bidang Perekonomian yang diselesaikan	Persen	100		
13 Koordinasi, sinkronisasi, Moitoring, dan evaluasi kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD		Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Dokumen	3	296,609,000		13 Koordinasi, sinkronisasi, Moitoring, dan evaluasi kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD		Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Dokumen	3	268.818.000	
14 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian		Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Laporan	4	490,280,000		14 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian		Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Laporan	4	423.176.000	
15 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil		Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Dokumen	4	652,536,400		15 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil		Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Dokumen	4	546.669.200	
6. Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam							**6. Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam**						
Sasaran Kegiatan :		**Keluaran :**					**Sasaran Kegiatan :**		**Keluaran :**				
Terkendalinya Kebijakanan Sumber Daya Alam		Terwujudnya Kesesuaian Kebijakan Sumber Daya Alam	Dokumen	1	28,428,000		Terkendalinya Kebijakanan Sumber Daya Alam		Terwujudnya Kesesuaian Kebijakan Sumber Daya Alam	Dokumen	1	14.214.000	
		Hasil :							**Hasil :**				
		Prosentase Dokumen Kebijakan Sumber Daya Alam	Persen	100					Prosentase Dokumen Kebijakan Sumber Daya Alam	Persen	100		
16 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Perekonomian	Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Dokumen	1	9,476,000		16 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Perekonomian	Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Dokumen	1	4.738.000	

RANCANGAN AWAL 2025							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN 2025						
Program/Sasaran Program dan Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)		Satuan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan 2025	Program/Sasaran Program dan Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)		Satuan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan 2025	
						Target / Rp.							Target / Rp.
17	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Perekonomian	Keluaran :	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	Dokumen	1 / 9,476,000	17 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup		Perekonomian	Keluaran :	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	Dokumen	1	4.738.000
18	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Perekonomian	Keluaran :	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	Dokumen	1 / 9,476,000	18 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air		Perekonomian	Keluaran :	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	Dokumen	1	4.738.000
Sasaran Program :			**Capaian Program (Indikator Program):**				**Sasaran Program :**			**Capaian Program (Indikator Program) :**			
5	Meningkatnya Kepatuhan Perangkat Daerah terhadap Administrasi Pembangunan	ADMINISTRASI PEMBANGUNAN		Prosentase Jumlah Perangkat Daerah yang patuh terhadap pemenuhan Administrasi Pembangunan	Persen	100	5 Meningkatnya Kepatuhan Perangkat Daerah terhadap Administrasi Pembangunan		ADMINISTRASI PEMBANGUNAN		Prosentase Jumlah Perangkat Daerah yang patuh terhadap pemenuhan Administrasi Pembangunan	Persen	100
6. Pelaksanaan Administrasi Pembangunan							**6. Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**						
Sasaran Kegiatan:			**Keluaran :**				**Sasaran Kegiatan:**			**Keluaran :**			
	Tertibnya Administrasi Pembangunan pada Perangkat Daerah			Tersedianya Dokumen Perangkat Daerah yang patuh terhadap pemenuhan Administrasi Pembangunan	Dokumen	1 / 1,111,147,000	Tertibnya Administrasi Pembangunan pada Perangkat Daerah				Tersedianya Dokumen Perangkat Daerah yang patuh terhadap pemenuhan Administrasi Pembangunan	Dokumen	1 / 542.032.500
			Hasil :							**Hasil :**			
				Prosentase Jumlah Perangkat Daerah yang patuh terhadap pemenuhan Administrasi Pembangunan	Persen	100					Prosentase Jumlah Perangkat Daerah yang patuh terhadap pemenuhan Administrasi Pembangunan	Persen	100
19	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Administrasi Pembangunan	Keluaran :	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Dokumen	1 / 272,382,000	19 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan		Administrasi Pembangunan	Keluaran :	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Dokumen	1 / 39.957.000

RANCANGAN AWAL 2025							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN 2025						
Program/Sasaran Program dan Kegiatan		**Lokasi**	**Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)**		**Satuan**	**Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan 2025**	**Program/Sasaran Program dan Kegiatan**		**Lokasi**	**Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)**		**Satuan**	**Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan 2025**
						Target / **Rp.**							**Target** / **Rp.**
20	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Administrasi Pembangunan	Keluaran :	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Laporan	1 / 408,398,000	20	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Administrasi Pembangunan	Keluaran :	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Laporan	1 / 142.235.000
21	Pengelola Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pembangunan	Administrasi Pembangunan	Keluaran :	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan	1 / 430,367,000	21	Pengelola Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pembangunan	Administrasi Pembangunan	Keluaran :	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan	1 / 359.840.500
Sasaran Program :			**Capaian Program (Indikator Program) :**				**Sasaran Program :**			**Capaian Program (Indikator Program) :**			
6	Meningkatkan kualitas Pengadaan Barang dan Jasa	PPBJ		Indeks Tata Kelola Pengelolaan Pengadaan Barang Dan Jasa	Predikat	Baik	6	Meningkatkan kualitas Pengadaan Barang dan Jasa	PPBJ		Indeks Tata Kelola Pengelolaan Pengadaan Barang Dan Jasa	Predikat	Baik
7. Pengelolaan Pegadaan Barang dan Jasa							**7. Pengelolaan Pegadaan Barang dan Jasa**						
Sasaran Kegiatan:			**Keluaran :**				**Sasaran Kegiatan:**			**Keluaran :**			
	Tercapainya Pengadaan barang dan Jasa			Terwujudnya Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen	1 / 1,532,418,100		Tercapainya Pengadaan barang dan Jasa			Terwujudnya Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen	1 / 1.275.783.900
			Hasil :							**Hasil :**			
				nilai Hasil Pencapaian Indeks Tata Kelola Pengelolaan Barang Jasa	Predikat	Baik					nilai Hasil Pencapaian Indeks Tata Kelola Pengelolaan Barang Jasa	Predikat	Baik
22	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	PPBJ	Keluaran :	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen	1 / 525,730,000	22	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	PPBJ	Keluaran :	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen	1 / 514.586.000
23	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	PPBJ	Keluaran :	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Dokumen	1 / 411,762,100	23	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	PPBJ	Keluaran :	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Dokumen	1 / 199.799.900
24	Pembinaan dan advokasi pengadaan Barang dan Jasa	PPBJ	Keluaran :	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Orang	100 / 594,926,000	24	Pembinaan dan advokasi pengadaan Barang dan Jasa	PPBJ	Keluaran :	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Orang	100 / 561.398.000

RANCANGAN AWAL 2025							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN 2025						
Program/Sasaran Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)		Satuan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan 2025		Program/Sasaran Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)		Satuan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan 2025	
					Target	Rp.						Target	Rp.
		1	Indikator sasaran : Persentase Capaian Sasaran Strategis OPD dalam lingkup koordinasi dan pelayanan adminstrasi umum sesuai dengan target yang ditetapkan	Persen	100				1	Indikator sasaran : Persentase Capaian Sasaran Strategis OPD dalam lingkup koordinasi dan pelayanan adminstrasi umum sesuai dengan target yang ditetapkan	Persen	100	
		2	Nilai Sakip	Nilai	83.70				2	Nilai Sakip	Nilai	83.70	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA							PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA						
Sasaran Program :	UMUM						Sasaran Program :	UMUM					
7 Meningkatnya pemenuhan administrasi umum		Cakupan pemenuhan admisntrasi umum dan Sarana prasarana		Persen	100	119,505,346,014	7 Meningkatnya pemenuhan administrasi umum		Cakupan pemenuhan admisntrasi umum dan Sarana prasarana		Persen	100	48.914.341.616,00
8. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							8. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						
Sasaran Kegiatan :		Keluaran :					Sasaran Kegiatan :		Keluaran :				
Tercapainya Pendataan Barang Milik daerah yang Akuntabel			Tersedianya laporan Barang Milik Daerah	Dokumen	5	70,370,000	Tercapainya Pendataan Barang Milik daerah yang Akuntabel			Tersedianya laporan Barang Milik Daerah	Dokumen	5	59.314.000
		Hasil :							Hasil :				
			Cakupan layanan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Persen	100					Cakupan layanan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Persen	100	
25 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Umum	Keluaran :	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	4	40,590,000	25 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Umum	Keluaran :	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	4	37.162.000

RANCANGAN AWAL 2025							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN 2025						
Program/Sasaran Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)		Satuan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan 2025		Program/Sasaran Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)		Satuan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan 2025	
					Target	Rp.						Target	Rp.
26 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Umum	Keluaran :	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	29,780,000	26 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Umum	Keluaran :	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	22.152.000
9. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							**9. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**						
Sasaran Kegiatan :		**Keluaran** :					**Sasaran Kegiatan :**		**Keluaran** :				
Tercapainya Sumber Daya Aparatur Lingkup Sekretariat Daerah			Tersedianya fasilitasi Peningkatan Kapasitas Pegawai	Orang	162	1,150,442,800	Tercapainya Sumber Daya Aparatur Lingkup Sekretariat Daerah			Tersedianya fasilitasi Peningkatan Kapasitas Pegawai	Orang	162	**1.142.342.800**
		Hasil :							**Hasil :**				
			Prosentase Meningkatnya Kapasitas Pegawai	Persen	100					Prosentase Meningkatnya Kapasitas Pegawai	Persen	100	
27 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Umum	Keluaran :	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	581,680,800	27 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Umum	Keluaran :	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	581.680.800
28 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Umum	Keluaran :	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	50	568,762,000	28 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Umum	Keluaran :	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	50	**560.662.000**
10. Administrasi Umum Perangkat Daerah							**10. Administrasi Umum Perangkat Daerah**						
Sasaran Kegiatan :		**Keluaran :**					**Sasaran Kegiatan :**		**Keluaran :**				
Tercapainya Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran			Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	Jenis	7	15,446,085,711	Tercapainya Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran			Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	Jenis	7	18.876.089.451
		Hasil :							**Hasil :**				
			Persentasi Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	Persen	100					Persentasi Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	Persen	100	

RANCANGAN AWAL 2025								HASIL ANALISIS KEBUTUHAN 2025							
Program/Sasaran Program dan Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)		Satuan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan 2025		Program/Sasaran Program dan Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)		Satuan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan 2025	
						Target	Rp.							Target	Rp.
29	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Umum	Keluaran :	JumlahPaket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	779,301,740	29	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Umum	Keluaran :	JumlahPaket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	920.819.940
30	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Umum	Keluaran :	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	2,721,355,000	30	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Umum	Keluaran :	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	2.863.768.000,03.919.874.820
31	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Umum	Keluaran :	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	749,332,001	31	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Umum	Keluaran :	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	863.375.051
32	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Umum	Keluaran :	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	2,573,745,000	32	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Umum	Keluaran :	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	4.647.198.000
33	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Umum	Keluaran :	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	215,286,000	33	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Umum	Keluaran :	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	208.014.000
34	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Umum	Keluaran :	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	4,696,093,970	34	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Umum	Keluaran :	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	5.964.144.640
35	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Keuangan	Keluaran :	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	3,710,972,000	35	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Keuangan	Keluaran :	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	2.352.663.000
11. Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah								**11. Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**							
Sasaran Kegiatan:			**Keluaran :**					**Sasaran Kegiatan:**			**Keluaran :**				
	Tercapainya Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah			Tersedianya Fasiltasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Paket	3	1,545,276,500		Tercapainya Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah			Tersedianya Fasiltasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Paket	3	1.619.548.820
			Hasil :								**Hasil :**				

RANCANGAN AWAL 2025								HASIL ANALISIS KEBUTUHAN 2025							
Program/Sasaran Program dan Kegiatan		**Lokasi**	**Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)**		**Satuan**	**Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan 2025**		**Program/Sasaran Program dan Kegiatan**		**Lokasi**	**Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)**		**Satuan**	**Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan 2025**	
						Target	**Rp.**							**Target**	**Rp.**
				Cakupan Layanan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persen	100						Cakupan Layanan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persen	100	
36	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Umum	Keluaran	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	1	819,824,000	36	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Umum	Keluaran	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	1	894.096.320
37	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Umum	Keluaran	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	1	725,452,500	37	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Umum	Keluaran	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	1	725.452.500
12. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								**12. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							
Sasaran Kegiatan:			**Keluaran :**					**Sasaran Kegiatan:**			**Keluaran :**				
	Terpenuhinya Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	1	33,486,000		Terpenuhinya Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	1	33.486.000
			Hasil :								**Hasil :**				
				Prosentase Pemenuhan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100						Prosentase Pemenuhan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100	
39	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Umum	Keluaran :	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	7	33,486,000	39	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Umum	Keluaran :	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	33.486.000

RANCANGAN AWAL 2025								HASIL ANALISIS KEBUTUHAN 2025							
Program/Sasaran Program dan Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)		Satuan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan 2025		Program/Sasaran Program dan Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)		Satuan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan 2025	
						Target	Rp.							Target	Rp.
13. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								**13. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							
Sasaran Kegiatan:			**Keluaran :**					**Sasaran Kegiatan:**			**Keluaran :**				
	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Penunjang Perkantoran			Tersedianya Kebutuhan Jasa Penunjang Perkantoran	Laporan	4	34,150,525,680		Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Penunjang Perkantoran			Tersedianya Kebutuhan Jasa Penunjang Perkantoran	Laporan	4	**33.117.178.046**
			Hasil :								**Hasil :**				
				Persentase pemenuhan Jasa Penunjang Perkantoran	Persen	100						Persentase pemenuhan Jasa Penunjang Perkantoran	Persen	100	
40	Penyedia Jasa Surat Menyurat	Umum	Keluaran :	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	24	188,620,000	40	Penyedia Jasa Surat Menyurat	Umum	Keluaran :	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	24	201.780.000
41	Penyedia Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik	Umum	Keluaran :	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	5	11,140,199,380	41	Penyedia Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik	Umum	Keluaran :	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	5	**11.140.936.746**
42	Penyedia Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Umum	Keluaran :	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	2,400,205,000	42	Penyedia Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Umum	Keluaran :	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	2.400.205.000
43	Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor	Umum	Keluaran :	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	6	20,421,501,300	43	Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor	Umum	Keluaran :	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	6	19.374.256.300

RANCANGAN AWAL 2025							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN 2025						
Program/Sasaran Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)		Satuan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan 2025		Program/Sasaran Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)		Satuan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan 2025	
					Target	Rp.						Target	Rp.
14. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan							**14. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan**						
Sasaran Kegiatan :		**Keluaran :**					**Sasaran Kegiatan :**		**Keluaran :**				
Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis	4	5,843,598,400	Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis	4	6.150.884.000
		Hasil :							**Hasil :**				
			Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100					Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	
44 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Umum	Keluaran :	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	118	2,804,494,400	44 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Umum	Keluaran :	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	118	2.915.280.000
45 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Umum	Keluaran :	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	4	248,000,000	45 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Umum	Keluaran :	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	4	248.000.000
46 Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Umum	Keluaran :	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5	909,904,000	46 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Umum	Keluaran :	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5	1.106.404.000

RANCANGAN AWAL 2025								HASIL ANALISIS KEBUTUHAN 2025							
Program/Sasaran Program dan Kegiatan		**Lokasi**	**Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)**		**Satuan**	**Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan 2025**		**Program/Sasaran Program dan Kegiatan**		**Lokasi**	**Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)**		**Satuan**	**Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan 2025**	
						Target	**Rp.**							**Target**	**Rp.**
47	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Umum	Keluaran :	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	13		47	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Umum	Keluaran :	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	13	
Sasaran Program :			**Capain Program**					**Sasaran Program :**			**Capain Program**				
8	Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengelolaan keuangan	perencanaan keuangan	1	Persentase dokumen perencanan dan pelaporan tepat waktu	Persen	100		8	Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengelolaan keuangan	perencanaan keuangan	1	Persentase dokumen perencanan dan pelaporan tepat waktu	Persen	100	
15. Perencanaan Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Indikator : Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah					**15. Perencanaan Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			Indikator : Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah				
Sasaran Kegiatan:			**Keluaran** :					**Sasaran Kegiatan:**			**Keluaran** :				
	Tercapainya kualitas Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	12	1,835,066,784		Tercapainya kualitas Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	13	2.082.201.984
			Hasil :								**Hasil :**				
				Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi yang disusun	Persen	100						Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi yang disusun	Persen	100	

RANCANGAN AWAL 2025								HASIL ANALISIS KEBUTUHAN 2025							
Program/Sasaran Program dan Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)		Satuan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan 2025		Program/Sasaran Program dan Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)		Satuan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan 2025	
						Target	Rp.							Target	Rp.
48	Penyusunan. Dokumen Perencanaan perangkat Daerah	Perc. Keu	Keluaran :	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	1,235,409,784	48	Penyusunan. Dokumen Perencanaan perangkat Daerah	Perc. Keu	Keluaran :	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	154.613.784
49	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Perc. Keu	Keluaran :	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	3,815,000	49	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Perc. Keu	Keluaran :	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	3.815.000
50	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Perc. Keu	Keluaran :	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	11,445,000	50	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Perc. Keu	Keluaran :	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	14.895.000
51	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Perc. Keu	Keluaran :	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	15,260,000	51	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Perc. Keu	Keluaran :	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	15.260.000
52	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Perc. Keu	Keluaran :	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	11,445,000	52	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Perc. Keu	Keluaran :	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	11.445.000

RANCANGAN AWAL 2025								HASIL ANALISIS KEBUTUHAN 2025							
Program /Sasaran Program dan Ke giatan		Lokasi	Indikator Kine rja Tujuan, sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)		Satuan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan 2025		Program /Sasaran Program dan Kegiatan		Lokasi	Indikator Kine rja Tujuan, sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)		Satuan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan 2025	
						Target	Rp.							Target	Rp.
53	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Perc. Keu	Keluaran :	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	151,360,000	53	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Perc. Keu	Keluaran :	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	121.962.400
54	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perc. Keu	Keluaran :	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5	406,332,000	54	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perc. Keu	Keluaran :	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5	**1.760.210.800**
16. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								**16. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							
Sasaran Kegiatan :			Keluaran :					Sasaran Ke giatan :			Keluaran :				
	T erpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Tersedianya laporan Administrasi keuangan Perangkat Daerah	Dokumen	6	46,481,375,749		T erpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			T ersedianya laporan Administrasi keuangan Perangkat Daerah	Dokumen	6	48.681.845.2620
			Hasil :								Hasil :				
				Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100						Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100	
55	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Perc. Keu	Keluaran :	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan T unjangan ASN	Orang/bulan	152/12	46,353,965,749	55	Penyediaan Gaji dan T unjangan A	Perc. Keu	Keluaran :	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan T unjangan ASN	Orang/bulan	152/12	48.462.447.262
56	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Perc. Keu	Keluaran :	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	1	25,508,000	56	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Perc. Keu	Keluaran :	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	1	60.371.000
57	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Perc. Keu	Keluaran :	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	1	26,940,000	57	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Perc. Keu	Keluaran :	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	1	26.045.000
58	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Perc. Keu	Keluaran :	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	1	16,390,000	58	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Perc. Keu	Keluaran :	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	1	0-
59	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Perc. Keu	Keluaran :	Jumlah Laporan Keuangan Akhir T ahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir T ahun SKPD	Laporan	1	45,102,000	59	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Perc. Keu	Keluaran :	Jumlah Laporan Keuangan Akhir T ahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir T ahun SKPD	Laporan	1	16.390.000
60	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Perc. Keu	Keluaran :	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ T riwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/T riwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	1	13,470,000	60	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Perc. Keu	Keluaran :	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ T riwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/T riwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	1	103.122.000

RANCANGAN AWAL 2025								HASIL ANALISIS KEBUTUHAN 2025							
Program /Sasaran Program dan Ke giatan		Lokasi	Indikator Kine rja Tujuan, sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)		Satuan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan 2025		Program /Sasaran Program dan Ke giatan		Lokasi	Indikator Kine rja Tujuan, sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)		Satuan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan 2025	
						Target	Rp.							Target	Rp.
61	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Perc. Keu	Keluaran :	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1	13,470,000	61	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Perc. Keu	Keluaran :	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1	13.470.000
17. Administrasi keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah								**17. Administrasi keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**							
Sasaran Ke giatan :			Ke luaran :					Sasaran Ke giatan :			Ke luaran :				
	Terpenuhinya Administrasi Keuangan dan Operasional KDH dan WKDH			Tersedianya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang	2	8,581,374,440		T erpenuhinya Administrasi Keuangan dan Operasional KDH dan WKDH			Tersedianya Gaji dan T unjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang	2	8.914.678.614
			Hasil :								Hasil :				
				Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan dan Operasional KDH WKDH	Dokumen	2						Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan dan Operasional KDH WKDH	Dokumen	2	
62	Penyedia Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Perc. Keu	Keluaran :	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan T unjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang/Bulan	.2/12	1,475,476,448	62	Penyedia Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Perc. Keu	Keluaran :	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan T unjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang/Bulan	.2/12	1.199.654.018
63	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Perc. Keu	Keluaran	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang/Bulan	2	84,000,000	63	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Perc. Keu	Keluaran	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang/Bulan	2	42.000.000
64	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Perc. Keu	Keluaran :	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang/Bulan	.2/12	7,021,897,992	63	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Perc. Keu	Keluaran :	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang/Bulan	.2/12	5.588.195.808,07.6 73.024.596
Sasaran Program :			Capain Program					Sasaran Program :			Capain Program				
9	Meningkatnya kualitas Pelayanan Pimpinan	PROTOKOL	1	Persentase pemenuhan kegiatan keprotokolan dan komunikasi pimpinan	Persen	100		9	Meningkatnya kualitas Pelayanan Pimpinan	PROTOKOL	1	Persentase pemenuhan kegiatan keprotokolan dan komunikasi pimpinan	Persen	100	
18. Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan								**18. Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**							
Sasaran Kegiatan:			Keluaran :					Sasaran Kegiatan:			Keluaran :				
	Terpenuhinya Pelayanan Kedinasan KDH/WKDH dan Pejabat Daerah			Tersedianya Laporan Pelayanan Kedinasan KDH/WKDH dan Pejabat Daerah	Laporan	3	2,530,745,150		T erpenuhinya Pelayanan Kedinasan KDH/WKDH dan Pejabat Daerah			Tersedianya Laporan Pelayanan Kedinasan KDH/WKDH dan Pejabat Daerah	Laporan	3	2.744.527.150
			Hasil :								Hasil :				
				Prosentase Pemenuhan Pelayanan Kedinasan KDH/WKDH dan Pejabat Daerah	Persen	100						Prosentase Pemenuhan Pelayanan Kedinasan KDH/WKDH dan Pejabat Daerah	Persen	100	
65	Fasilitasi Keprotokolan	Protokol	Keluaran :	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Laporan	4	1,155,610,150	64	Fasilitasi Keprotokolan	Protokol	Keluaran :	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Laporan	4	1.235.740.150
66	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Protokol	Keluaran :	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Laporan	4	830,088,000	65	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Protokol	Keluaran :	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Laporan	4	961.588.000

RANCANGAN AWAL 2025								HASIL ANALISIS KEBUTUHAN 2025							
67	Pendokumentasian T ugas Pimpin	Protokol	Keluaran :	Jumlah Laporan Pendokumentasian T ugas Pimpinan	Laporan	4	545,047,000	66	Pendokumentasian T ugas Pimpin	Protokol	Keluaran :	Jumlah Laporan Pendokumentasian T ugas Pimpinan	Laporan	4	547.199.000
Sasaran Program :			Capain Program					Sasaran Program :			Capain Program				
10	Meningkatnya kualitas pelaporan		1	**Komponen Pelaporan SAKIP**	**Nilai**	**11.95**		10	Meningkatnya kualitas pelaporan		1	**Komponen Pelaporan SAKIP**	**Nilai**	**11.95**	
20. Penataan Organisasi								20. Penataan Organisasi							
Sasaran Kegiatan:			Keluaran :					Sasaran Kegiatan:			Keluaran :				
	Tercapainya Kualitas Pelaporan			**Terwujudnya Perangkat Daerah yang memiliki nilai AKIP berkategori A**	**Perangkat Daerah**	**12**	1,836,998,800		Tercapainya Kualitas Pelaporan			**Terwujudnya Perangkat Daerah yang memiliki nilai AKIP berkategori A**	**Perangkat Daerah**	**12**	**1.705.194.000**
			Hasil :								Hasil :				
68	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	**Organisasi**	Keluaran :	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	**Dokumen**	**3**	367,368,800		Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	**Organisasi**	Keluaran :	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	**Dokumen**	**3**	**292.906.800**
69	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Organisasi	Keluaran :	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pelayanan Publik dan Tata Laksana	Laporan		374,643,000		Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Organisasi	Keluaran :	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pelayanan Publik dan Tata Laksana	Laporan		**324.348.000**
70	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Organisasi	Keluaran :	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Dokumen		490,800,000		Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Organisasi	Keluaran :	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Dokumen		**473.723.200**
71	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Organisasi	Keluaran :	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Dokumen		309,517,000		Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Organisasi	Keluaran :	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Dokumen		**279.026.000**
72	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Organisasi	Keluaran :	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Dokumen		294,670,000		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Organisasi	Keluaran :	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Dokumen		**335.190.000**

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan yang ada di Sekretariat Daerah tidak ada yang berkaitan langsung dengan masyarakat karena Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah tidak ada yang berhubungan dengan pelayanan kepada masyarakat secara langsung, melainkan Sekretariat Daerah mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi untuk memfasilitasi dan mengkoordinasikan berbagai perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang.

Hasil pelaksanaan Musrenbang, tidak ada program/kegiatan yang diusulkan dari para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan Kabupaten, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi, maupun dari Bagian Administrasi Pembangunan Kecamatan atau sebutan lain yang fungsi lembaganya berhubungan dengan hal tersebut.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TANGERANG

Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. sedangkan program daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Sedangkan kegiatan yang selanjutnya disebut kegiatan perangkat daerah adalah serangkaian aktivitas yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.

Rencana Kerja Perubahan Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Tangerang Tahun 2025 berisi rancangan program dan kegiatan, yang mendukung, baik secara langsung, maupun secara tidak langsung, pencapaian sasaran untuk mewujudkan visi dan misi penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai kewenangan kabupaten. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang dibutuhkan agar program kegiatan tersebut dapat terlaksana secara optimal. Program dan kegiatan yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun 2025.

Rencana kerja berupa program dan kegiatan Bagian - bagian lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang sebagai instrumen pelaksana dari program perangkat daerah Tahun 2025 disajikan pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PERUBAHAN (RENJA OPD)
SEKRETARIAT DAERAH KAB. TANGERANG
TAHUN 2025

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja		Pagu Dana (Rp)		Keterangan
			Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2025	Tahun 2026	Prioritas/ Stunting/ Kemiskinan Ekstrem/ SPM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						
	SEKRETARIAT DAERAH						
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Predikat Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Predikat Tinggi	Predikat Tinggi	135.193.651.248,00	1,991,325,690,00	
1.	**Administrasi Tata Pemerintahan**	**Terwujudnya Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan**	**3 Dokumen**	**3 Dokumen**	**648.540.200,00**	**1.160.196.479,00**	
(1)	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	1 Dokumen	1 Dokumen	442.444.600,00	852,698,293,00	
(2)	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1 Dokumen	1 Dokumen	137.409.600,00	210.000.000,00	
(3)	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	68.686.000,00	97.498.186,00	
2.	**Fasilitasi Kerja Sama Daerah**	**Terfasilitasinya Kerjasama yang di tindaklanjuti**	**3 Dokumen**	**3 Dokumen**	**497.465.000,00**	**831,129,211,00**	
(4)	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	1 Dokumen	1 Dokumen	188.902.000,00	432.520.444,00	
No			Target Kinerja		Pagu Dana (Rp)		Keterangan

	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2025	Tahun 2026	Prioritas/ Stunting/ Kemiskinan Ekstrem/ SPM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
(5)	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	1 Dokumen	1 Dokumen	167.828.000,00	249.575.767,00	
(6)	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	1 Laporan	1 Laporan	140.735.000,00	149,033,000,00	
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						
	SEKRETARIAT DAERAH						
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Indeks Reformasi Hukum	Predikat Baik	Predikat Baik	135.193.651.248,00	2,003,659,570,00	
3.	**Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**	**Tersedianya Produk Hukum Daerah**	**20 Dokumen**	**20 Dokumen**	**1.829.535.570,00**	**2,003,659,570,00**	
(7)	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	20 Dokumen	20 Dokumen	330.305.000,00	426,794,000,00	
(8)	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	12 Kasus	12 Kasus	1.127.671.570,00	1,136,911,570,00	
(9)	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	20 Dokumen	20 Dokumen	371.559.000,00	439,954,000,00	
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						
	SEKRETARIAT DAERAH						
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Prosentase Hasil Kebijakan Yang ditetapkan	100 Persen	100 Persen	135.193.651.248,00	21,484,862,529,00	
No			Target Kinerja		Pagu Dana (Rp)		Keterangan

	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2025	Tahun 2026	Prioritas/ Stunting/ Kemiskinan Ekstrem/ SPM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4.	**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	**Tersedianya Kebijakan yang ditetapkan**	**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**132.218.110.478,00**	**21,484,862,529,00**	
(10)	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	1 Dokumen	1 Dokumen	8.308.196.500,00	8,441,850,100,00	
(11)	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	1 Dokumen	1 Dokumen	123.484.785.678,00	12,535,717,429,00	
(12)	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	1 Dokumen	1 Dokumen	425.128.300,00	507,295,000,00	
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						
	SEKRETARIAT DAERAH						
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Prosentase Rumusan kebijakan Perekonomian yang diselesaikan	100 Persen	100 Persen	2.969.764.100,00	1.467.853.400,00	
5.	**Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**	**Terwujudnya Perumusan perencanaan ekonomi**	**5 Dokumen**	**5 Dokumen**	**1.195.108.000,00**	**1.439.425.400,00**	
No		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja		Pagu Dana (Rp)		Keterangan

	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2025	Tahun 2026	Prioritas/ Stunting/ Kemiskinan Ekstrem/ SPM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
(13)	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	3 Dokumen	3 Dokumen	225.064.000,00	296,609,000,00	
(14)	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	4 Laporan	4 Laporan	423.176.000,00	490,280,000,00	
(15)	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	4 Dokumen	4 Dokumen	546.868.000,00	652,536,400,00	
6.	**Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam**	**Terwujudnya Kesesuaian Kebijakan Sumber Daya Alam**	**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**14.214.000,00**	**28,428,000,00**	
(16)	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	1 Dokumen	1 Dokumen	4.738.000,00	9,476,000,00	
(17)	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	1 Dokumen	1 Dokumen	4.738.000,00	9,476,000,00	
(18)	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman,Pertanahan	1 Dokumen	1 Dokumen	4.738.000,00	9,476,000,00	
No			Target Kinerja		Pagu Dana (Rp)		Keterangan

	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2025	Tahun 2026	Prioritas/ Stunting/ Kemiskinan Ekstrem/ SPM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						
	SEKRETARIAT DAERAH						
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Prosentase Jumlah Perangkat Daerah yang patuh terhadap pemenuhan Administrasi Pembangunan	100 Persen Baik Predikat	100Persen Sangat Baik Predikat	2.969.764.100,00	1,111,147,000,00	
7.	**Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**	**Tersedianya Dokumen Perangkat Daerah yang patuh terhadap pemenuhan Administrasi Pembangunan**	**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**483.798.000,00**	**1,111,147,000,00**	
(19)	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	21.982.000,00	272,382,000,00	
(20)	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	1 Laporan	1 Laporan	148.035.000,00	408,398,000,00	
(21)	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	1 Laporan	1 Laporan	313.781.000,00	430,367,000,00	
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						
	SEKRETARIAT DAERAH						
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Predikat Indeks Tata Kelola Pengelolaan Pengadaan Barang Dan Jasa	Predikat Baik	Predikat Baik	2.969.764.100,00	1,643,786,800,00	
8.	**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	**Terwujudnya Layanan Pengadaan Barang dan Jasa**	**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**1.276.644.100,00**	**1,643,786,800,00**	
No		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja		Pagu Dana (Rp)		Keterangan

	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2025	Tahun 2026	Prioritas/ Stunting/ Kemiskinan Ekstrem/ SPM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
(22)	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1 Dokumen	1 Dokumen	414.426.000,00	525,730,000,00	
(23)	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	1 Dokumen	5 Dokumen	415.562.100,00	509,456,800,00	
(24)	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	100 Orang	200 Orang	446.656.000,00	608,600,000,00	
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						
	SEKRETARIAT DAERAH						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pemenuhan admisntrasi umum dan Sarana prasarana	100 Persen	100 Persen	117.864.613.104,00	64.239.785.091,00	
9.	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Tersedianya laporan Barang Milik Daerah**	**5 Dokumen**	**5 Dokumen**	**59.314.000,00**	**70,370,000,00**	
(25)	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	37.162.000,00	40,590,000,00	
(26)	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	22.152.000,00	29,780,000,00	
10.	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Tersedianya fasilitasi Peningkatan Kapasitas Pegawai**	**162 Orang**	**162 Orang**	**1.142.342.800,00**	**1,150,442,800,00**	
(27)	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	581.680.800,00	581,680,800,00	
No			Target Kinerja		Pagu Dana (Rp)		Keterangan

	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2025	Tahun 2026	Prioritas/ Stunting/ Kemiskinan Ekstrem/ SPM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
(28)	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50 Orang	50 Orang	560.662.000,00	568,762,000,00	
11.	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah**	**7 Jenis**	**7 Jenis**	**13.908.828.711,00**	**19,446,085,711,00**	
(29)	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	779.301.740,00	779,301,740,00	
(30)	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	2.721.355.000,00	2,721,355,000,00	
(31)	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	749.332.001,00	749,332,001,00	
(32)	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	2.422.505.000,00	2,573,745,000,00	
(33)	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	208.014.000,00	215,286,000,00	
(34)	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	4.148.935.970,00	6,696,093,970,00	
(35)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	2.879.385.000,00	5,710,972,000,00	
12.	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**17 Unit**	**1 Unit**	**33.486.000,00**	**33.486.000,00**	
(36)	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	17 Unit	1 Unit	33.486.000,00	33.486.000,00	
No			Target Kinerja		Pagu Dana (Rp)		Keterangan

	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2025	Tahun 2026	Prioritas/ Stunting/ Kemiskinan Ekstrem/ SPM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
13.	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya Kebutuhan Jasa Penunjang Perkantoran**	**4 Laporan**	**4 Laporan**	**34.149.345.680,00**	**36.150.525.680,00**	
(37)	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	24 Laporan	24 Laporan	187.440.000,00	188.620.000,00	
(38)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 Laporan	5 Laporan	11.140.199.380,00	13.140.199.380,00	
(39)	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	2.400.205.000,00	2.400.205.000,00	
(40)	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Laporan	6 Laporan	20.421.501.300,00	20.421.501.300,00	
14.	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**4 Jenis**	**4 Jenis**	**5.840.098.400,00**	**5.843.598.400,00**	
(41)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	118 Unit	118 Unit	2.800.994.400,00	2.804.494.400,00	
(42)	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	4 Unit	248.000.000,00	248.000.000,00	
(43)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	5 Unit	5 Unit	909.904.000,00	909.904.000,00	
(44)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	13 Unit	13 Unit	1.881.200.000,00	1.881.200.000,00	
No			Target Kinerja		Pagu Dana (Rp)		Keterangan

	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2025	Tahun 2026	Prioritas/ Stunting/ Kemiskinan Ekstrem/ SPM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
15.	**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**	**Tersedianya Fasiltasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**	**3 Paket**	**3 Paket**	**1.545.276.500,00**	**1.545.276.500,00**	
(45)	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	819.824.000,00	819.824.000,00	
(46)	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	725.452.500,00	725.452.500,00	
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						
	SEKRETARIAT DAERAH						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dokumen perencanan dan pelaporan tepat waktu	100 Persen	100 Persen	117.864.613.104,00	61.424.172.370,00	
16.	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**13 Dokumen**	**12 Dokumen**	**619.891.184,00**	**1.651.865.007,00**	
(47)	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	10 Dokumen	122.863.784,00	674.322.474,00	
(48)	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	-	3.815.000,00	-	
(49)	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	-	14.895.000,00	-	
No			Target Kinerja		Pagu Dana (Rp)		Keterangan

	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2025	Tahun 2026	Prioritas/ Stunting/ Kemiskinan Ekstrem/ SPM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
(50)	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	-	15.260.000,00	-	
(51)	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	-	11.445.000,00	-	
(52)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	121.962.400,00	545.229.335,00	
(53)	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	5 Laporan	329.650.000,00	432,313,198,00	
17.	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tersedianya laporan Administrasi keuangan Perangkat Daerah**	**6 Dokumen**	**6 Dokumen**	**47.788.606.163,00**	**50.890.932.923,00**	
(54)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	152/12 Orang/Bulan	204/12 Orang/bulan	47.683.588.163,00	50.353.965.749,00	
(55)	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	19.131.000,00	55.125.000,00	
(56)	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	20.205.000,00	55.125.000,00	
(57)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	1 Laporan	16.390.000,00	55.125.000,00	
No			Target Kinerja		Pagu Dana (Rp)		Keterangan

	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2025	Tahun 2026	Prioritas/ Stunting/ Kemiskinan Ekstrem/ SPM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
(58)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	1 Laporan	41.662.000,00	316.467.174,00	
(59)	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	7.630.000,00	55.125.000,00	
18.	**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**Tersedianya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**2 Orang**	**2 Orang**	**8.882.766.316,00**	**8.881.374.440,00**	
(60)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	.2/12 Orang/Bulan	.2/12 Orang/Bulan	1.475.476.448,00	1.775.476.448,00	
(61)	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 orang	2 Orang	84.000.000,00	84.000.000,00	
(62)	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	.2/12 Orang/Bulan	.2/12 Orang/Bulan	7.323.289.868,00	7.021.897.992,00	
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						
	SEKRETARIAT DAERAH						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kegiatan keprotokolan dan komunikasi pimpinan	100 Persen	100 Persen	117.864.613.104,00	3,379,166,513,00	
No			Target Kinerja		Pagu Dana (Rp)		Keterangan

	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2025	Tahun 2026	Prioritas/ Stunting/ Kemiskinan Ekstrem/ SPM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
19.	**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	**Tersedianya Laporan Pelayanan Kedinasan KDH/WKDH dan Pejabat Daerah**	**3 Laporan**	**3 Laporan**	**2.353.626.150,00**	**3,379,166,513,00**	
(63)	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	4 Laporan	4 Laporan	1.094.450.150,00	1,036,604,561,00	
(64)	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	4 Laporan	4 Laporan	796.088.000,00	1,327,907,115,00	
(65)	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	4 Laporan	4 Laporan	463.088.000,00	1,014,654,837,00	
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						
	SEKRETARIAT DAERAH						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Komponen Pelaporan SAKIP	12 Nilai	12.05 Nilai	117.864.613.104,00	1,065,024,152,00	
20.	**Penataan Organisasi**	**Terwujudnya Perangkat Daerah yang memiliki Nilai AKIP berkategori A**	**15 Perangkat Daerah**	**18 Perangkat Daerah**	**1.541.031.200,00**	**1,065,024,152,00**	
(66)	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	3 Dokumen	3 Dokumen	285.649.200,00	340,377,636,00	
(67)	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2 Laporan	2 Laporan	324.348.000,00	237,669,503,00	
(68)	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	2 Dokumen	2 Dokumen	451.420.000,00	266,477,013,00	
No			Target Kinerja		Pagu Dana (Rp)		Keterangan

	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2025	Tahun 2026	Prioritas/ Stunting/ Kemiskinan Ekstrem/ SPM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
(69)	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Dokumen	1 Dokumen	263.114.000,00	110,250,000,00	
(70)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	216.500.000,00	110,250,000,00	
Jumlah					**256.028.028.452,00**	**160.369.710.225,00**	

BAB IV
PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2025 merupakan bagian dari dokumen perencanaan pembangunan, guna mendukung pencapaian arah, tujuan, sasaran dan target prioritas rencana pembangunan jangka pendek tahun 2025. Disamping itu, dengan ditetapkannya indikator-indikator kinerja dari kegiatan yang akan dilaksanakan sehingga dapat diukur capaian kinerjanya sekaligus memudahkan untuk mengadakan evaluasi keberhasilan dan kegagalan.

Dengan tersusunya Rencana Kerja Perubahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2025, diharapkan dapat menjadi panduan dalam melaksanakan kegiatan guna mendukung pencapaian arah, tujuan, sasaran dan target pembangunan Pemerintah Kabupaten Tangerang Tahun 2025. Selain itu untuk menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integrasi, efektivitas dan efesiensi pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana yang telah tertuang dalam Rencana Kerja Perubahan ini, maka diharapkan adanya komitmen dari seluruh aparatur guna bersama-sama melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Rencana Kerja Perubahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2025, adapun langkah- langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi dan efektivitas dan efesiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta lingkungan strategis yang relatif cepat maka renja ini juga bersifat fleksibel, dengan kata lain sewaktu-waktu dapat dilakukan perubahan/penyesuaian seperlunya.

Semoga apa yang telah dituliskan dalam renja ini dapat membawa hasil positif dalam bidang administrasi pemerintahan khususnya dalam mewujudkan pemerintahan yang baik.

2. Sekretariat DPRD

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Setiap organisasi perangkat daerah (OPD) perlu menyusun Rencana Kerja (Renja) yang berpedoman pada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) :

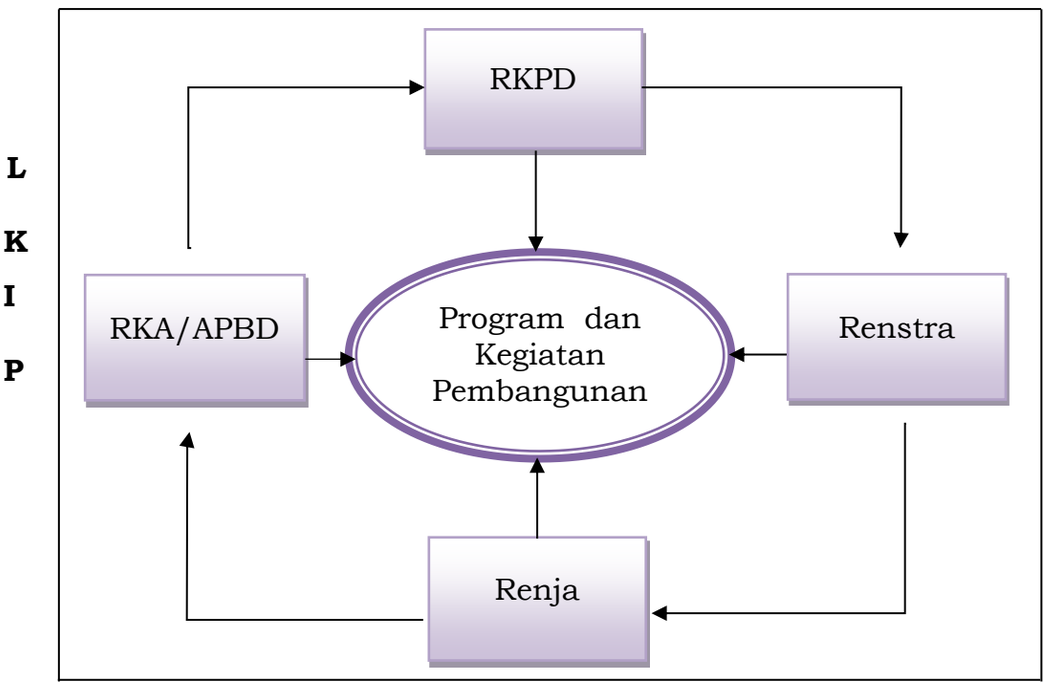

L K I P

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Tangerang, Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Perubahan merupakan dokumen perencanaan yang wajib dibuat oleh seluruh Perangkat Daerah sebagai Dokumen Perencanaan untuk periode 1 (satu) tahunan guna mencapai misi yang telah ditetapkan dan sebagai acuan dasar dalam melaksanakan penilaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran rencana strategis lima tahunan berisi program, kegiatan dan sub kegiatan yang harus dilaksanakan dalam satu tahun anggaran serta sebagai pedoman didalam penyusunan RKPD perangkat daerah dan penyusunan rencana kerja anggaran baik murni maupun perubahan.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-undang;
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
13. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggarn 2025;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
15. Permendagri Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dilingkungan Pemerintah Daerah/Kementerian Dalam Negeri;
16. Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

17. Permendagri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2024;
18. Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Tangerang;
20. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;
22. Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang;
23. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
24. Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang Tahun 2024–2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2025, dimaksudkan untuk menyiapkan dokumen perencanaan tahunan Sekretariat DPRD, sebagai implementasi dari pentahapan Rencana Strategis yang memuat tentang kumpulan kegiatan prioritas Organisasi Perangkat Daerah (PD) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi untuk periode satu tahun anggaran.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah :

1. Sebagai bahan masukan untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026
2. Sebagai acuan Sekretariat DPRD dalam melaksanakan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2025;
3. Sebagai alat kontrol organisasi dalam mengendalikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan tahunan;
4. Sebagai tolok ukur kinerja dan evaluasi secara obyektif sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan Sebagai acuan dalam melaksanakan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan.

1.4. Sistimatika Penulisan

Sistimatika Penulisan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang disusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menjelaskan pengertian Rencana Kerja, proses penyusunan Renja dan keterkaitan antara Renja dengan dokumen

RKPD, Renstra, Renja Kabupaten dalam proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat landasan hukum yang mendasari Penyusunan Rencana Kerja terdiri dari Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan OPD serta yang dijadikan acuan dalam perencanaan dan penganggaran OPD.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TANGERANG.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2025 dan capaian Renstra Sekretariat DPRD.
2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD.
2.3. Isu - isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD.
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Perubahan.
2.5. Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV P E N U T U P.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2025

Evaluasi Pelaksanaan Renja digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan sasaran target program dan kegiatan yang telah ditetapkan guna mewujudkan tujuan yang ditetapkan.

Evaluasi Renja dilakukan dengan menggunakan metode komparasi pembandingan, yaitu membandingkan antara rencana kerja dengan realisasi kinerja yang dicapai organisasi. Setelah itu, akan dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja yang terjadi serta tindakan perbaikan yang dilakukan dimasa yang akan datang.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2025 dan Capaian Renstra Sekretariat DPRD

Dalam rangka mengetahui tingkat capaian Indikator Kinerja sasaran tugas dan fungsi yang didukung program, kegiatan dan Sub kegiatan, maka setiap tahun dilakukan pengukuran capaian sasaran program dan kegiatan yang langsung mendukung tugas dan fungsi DPRD dan program penunjang pemerintah daerah kabupaten/kota. Pengukuran tingkat capaian sasaran program dan kegiatan tersebut dilakukan secara bertahap dari target indikator kinerja sebagaimana tergambar dalam Matrik capaian indikator kinerja Tahun 2025 sebagai berikut :

Target Capaian Indikator Kinerja

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke			Realisasi Capaian Tahun Ke			Rasio Capaian pada Tahun Ke		
					1	2	3	1	2	3	1	2	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026
1.	Prosentase rapat-rapat DPRD yang tepat waktu				100	100	100	82,23			82,23		
2.	Prosentase jumlah Rancangan Perda yang difasilitasi pembahasannya				81,75	83,38	85,05	94,29			115,33		
3.	Prosentase penyampaian Aspirasi Masyarakat melalui SIPD				75	86,25	94,88	34			45,33		
4.	Nilai Evaluasi AKIP				83,15	83,98	84,82	79,95			96,15		

Capaian indikator kinerja pelaksanaan Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dengan indikator Prosentase rapat-rapat DPRD yang tepat waktu terealisasi sebesar 82,23% dengan predikat cukup dari target yang direncanakan 100%. Indikator kinerja didukung oleh 6 kegiatan dengan rata-rata capaian 75% sd 100%. Terdapat satu kegiatan yang tidak mencapai target yaitu Kegiatan Layanan Administrasi DPRD sebesar 54,74%, Hal ini disebabkan adanya rapat-rapat yang dilaksanakan secara bersamaan dalam satu hari seperti rapat-rapat

paripurna dan tidak dilaksanaka seluruhnya rapat-rapat AKD seperti rapat BKD, rapat Pimpinan dan rapat lainnya.

Capaian Kinerja
Prosentase Rapat-rapat DPRD Yang Tepat Waktu

Program	Indikator	Kegiatan/Sub Kegiatan	Output/Target	Target	Realiasai	Capaian Kinerja
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD						
	Prosentase rapat-rapat DPRD yang tepat waktu					82,23%
		Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran	Terlaksananya pembahasan dan penetapan rencana anggaran	100%	83,33%	83,33%
		Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Terselenggaranya pengawasan kinerja pemerintah	100%	83,33%	83,33%
		Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	Terlaksananya pemenuhan fasilitasi kapasitas DPRD	100%	76,43%	76,43%
		Layanan Administrasi DPRD	Terlaksanannya layanan Administrasi DPRD	100%	54,74%	54,74%
		Kegiatan Pembahasan Kerja Sama Daerah	Terlaksananya komunikasi dan publikasi	100%	100%	100%
		Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD	Terlaksananya fasilitasi tugas DPRD	100%	85,58%	85,58%

Capaian kinerja Prosentase jumlah Rancangan Perda yang difasilitasi pembahasannya telah memenuhi target dengan rata-rata capaian 92,86% sd 100% yaitu pada Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD dan Kegiatan Pelaksanaan Kode Etik. Pelaksanaan sub kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah ditarget 100% terealisasi 71,43% atau terealisasi 5 raperda dari 7 raperda yang ditargetkan, hal ini dikarenakan belum optimalnya perencanaan usulan raperda, jadwal pembahasan raperda yang belum pasti, muatan materi perda yang belum memenuhi syarat sehingga raperda yang diusulkan baik eksekutif dan inisiatif tidak lolos harmonisasi.

Capaian Kinerja
Presentase Jumlah Rancangan Perda Yang Difasilitasi Pembahasannya

Program	Indikator	Kegiatan/Sub Kegiatan	Output/Target	Target	Realiasai	Capaian Kinerja
	Prosentase jumlah Rancangan Perda yang difasilitasi pembahasannya					94,29%
		Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Terlaksananya pembahasan dan pembentukan raperda	100%	92,86%	92,86%
		Kegiatan Pelaksanaan Kode Etik	Terlaksananya penyusunan dokumen kode etik	100%	100%	100%

Capaian indikator kinerja Prosentase Penyampaian Aspirasi Masyarakat Melalui SIPD belum memenuhi target yang diinginkan hanya sebesar 80,83% dari target 100%. Ketidaktercapaian tersebut disebabkan ada sub kegiatan yang tidak dilaksanakan secara maksimal yaitu Penyusunan Pokok - Pokok Pikiran DPRD yang seharusnya diinput dalam SIPD sesuai waktu yang telah ditentukan, dalam pelaksanaannya hanya 17 orang anggota dewan dari 50 anggota dewan yang menginput pokok-pokok pikiran dalam SIPD.

Program	Indikator	Kegiatan/Sub Kegiatan	Output/Target	Target	Realiasai	Capaian Kinerja
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD						
	Prosentase penyampaian Aspirasi Masyarakat melalui SIPD					80,83%
		Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Terlaksananya penyerapan dan perhimpunan aspirasi masyarakat	100%	80,83%	80,83%

Capaian kinerja indikator Nilai Evaluasi AKIP berdasarkan hasil reviu Inspektorat terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2024 memperoleh skor angka 79,95 dari target yang ditentukan dalam Renstra yaitu 83,15 atau 96,15% atau masuk dalam kategori nilai **B** termasuk dalam predikat Sangat Baik. Akuntabilitas kinerja sangat baik dimaknai dengan diawali terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran

dalam mencapai kinerja, memiliki system manajemen kinerja yang cukup baik serta berbasis penggunaan teknologi informasi yang memadai, pengukuran kinerja yang telah dilakukan sudah pada level/tingkatan eselon 3 atau koordinator.

Namun demikian masih terdapat unsur-unsur manajemen kinerja yang belum dilaksanakan yang harus menjadi perhatian dan tindaklanjuti perbaikannya dalam penyusunan LAKIP tahun berikutnya, diantaranya:

1. SKP (e-Kinerja) belum memunculkan hasil kerja atasan yang diintervensi, target rencana hasil kerja dan capaian spesifik rencana hasil kerja.
2. Agar dalam penyusunan renja perubahan 2025 menyajikan penjelasan konkrit atas perubahan anggaran yang signifikan.
3. Agar disajikan screenshot aplikasi/software pengumpulan data kinerja baik untuk menyimpan, mengolah dan mengkompilasi data kinerja.
4. Agar disajikan SK Kepala Perangkat Daerah tenteng Dokumen LAKIP
5. Agar disajikan tanda terima penyerahan dokumen LAKIP T ahun 2024 kepada Kepala Daerah.

Capaian Target
Kegiatan dan Sub Kegiatan Triwulan I Tahun 2025

Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Output	Target	Realisasi	Capaian Target
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD			100	24,22	24,22
	Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Terlaksananya pembahasan dan pembentukan raperda	16 Dok	1 Dok	6,25
	Sub Penyusunan dan Pembahasan Program dan Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	5 Dok	1 Dok	20,00
	Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	8 Perda	0 Perda	0
	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/ Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Tersedianya naskah akademik dan draf raperda	3 dok	0 dok	0
	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Terlaksananya Pembahasan Kebijakan Anggaran			

Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Output	Target	Realisasi	Capaian Target
	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 dok	0 dok	0
	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 dok	0 dok	0
	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 dok	0 dok	0
	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 dok	0 dok	0
	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 dok	0 dok	0
	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Terselenggaranya Pengawasan Kinerja Pemerintahan	17 dok	5 dok	29,41
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	4 dok	1 dok	25,00
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	4 dok	1 dok	25,00
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	4 dok	1 dok	25,00
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	4 dok	1 dok	25,00
	Pembahasan Laporan KeteranganrnnPertanggung jawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 dok	1 dok	100
	Peningkatan Kapasitas DPRD	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas DPRD	593 kali/ org	143 kali/ org	24,11

Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Output	Target	Realisasi	Capaian Target
	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	6 kali	2 kali	33,33
	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	4 orang	0 orang	0
	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	8 orang	8 kali	100
	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	144 kali	25 kali	17,36
	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 dok	0 kali	0
	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	430 dok	108 kali	25,11
	Penyerapan Dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Terlaksananya Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	330 lap/dok	165 dok/lap	50,00
	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	55 Lap	55 lap	100
	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	110 Dok	55 dok	50,00
	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	165 Dok	55 dok	33,33
	Pembahasan Kerja Sama Daerah	Terlaksananya Komunikasi dan Publikasi	24 Dok	6 Dok	25,00
	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	24 Dok	6 Dok	25,00
	Fasilitasi Tugas DPRD		113 Dok	28 Dok	24,77
	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	119 Dok	25 Dok	21,00
	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat	1 Lap	0 Lap	0

Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Output	Target	Realisasi	Capaian Target
		Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun			
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	12 Dok	3 Dok	23,00
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	2 Dok	0 Dok	0

Capaian target Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD rata-rata telah mencapai 17,36% sampai dengan 50,00%. Program, kegiatan dan sub kegiatan pada triwulan I telah dilaksanakan sesuai rencana yang telah ditetapkan dalam dokumen anggaran maupun yang telah dijadwalkan oleh Badan Musyawarah. Capaian target tersebut merupakan perolehan yang normatif, masih sesuai perencanaan dan belum ada perubahan rencana pelaksanaan. Terdapat beberapa kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan pada triwulan II, III dan IV sehingga capaiannya masih 0% seperti Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah rencana dilaksanakan di triwulan II dan IV, Pembahasan KUA dan PPAS perubahan 2025 maupun Murni 2026 yang rencana dilaksanakan di triwulan II dan III, Pembahasan APBD perubahan 2025 dan Murni 2026 rencana dilaksanakan ditriwulan II dan III, Penyusunan Program Kerja DPRD rencana dilaksanakan di triwulan III, Penyusunan Laporan Kinerja DPRD yang rencana dilaksanakan di triwulan IV.

Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Output	Target	Realisasi	Capaian Target
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota			100	23,16	23,16
	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Dok	2 Dok	25,00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dok	2 Dok	66,66

Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Output	Target	Realisasi	Capaian Target
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dok	0 dok	0
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dok	0 dok	0
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan LaporanHasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dok	0 dok	0
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dok	0 dok	0
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan	69 org/ lap	42 org/ lap	60,86
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	60 org	40 org	66,66
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 lap	0 dok	0
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/	8 lap	2 dok	25,00

Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Output	Target	Realisasi	Capaian Target
	Triwulanan/ Semesteran SKPD	Triwulanan/ Semesteran SKPD			
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang difasilitasi	17 dok	5 dok	29,41
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta AtributKelengkapan	5 pkt	0 pkt	25,00
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	135 org	9 org	6,66
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1000 pkt/ lap	249 pkt/ lap	24,90
	Penyediaan Komponen InstalasirnnListrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	2 pkt	1 pkt	50,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7 pkt	2 pkt	28,57
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	7 pkt	2 pkt	28,57
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	2 pkt	2 pkt	28,57
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	2 pkt	1 pkt	50,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	16 dok	3 dok	18,75
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	108 lap	27 lap	25,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	856 lap	211 lap	24,64

Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Output	Target	Realisasi	Capaian Target
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah	132 unit	103 unit	78,03
	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	132 unit	103 unit	78,03
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang	12 lap	3 lap	25,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0 lap	0 lap	0
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 lap	3 lap	25,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	183 unit	41 unit	22,40
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	92 unit	23 unit	25,00
	Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	19 unit	2 unit	10,52
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	45 unit	10 unit	22,22
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2 unit	1 unit	50,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25 unit	5 unit	20,00

Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Output	Target	Realisasi	Capaian Target
	Layanan Keuangan Dan Kesejahteraan Dprd	Tersedianya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	115 org	56 org	48,69
	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Tersedianya Hak Keuangan Anggota DPRD	55 org	55 org	100
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Terlaksananya Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	5 pkt	1 pkt	20
	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Terlaksananya Medical Check Up DPRD	55 org	0 org	0
	Layanan Administrasi DPRD	Tersedianya Fasilitasi Rapat dan Koordinasi DPRD	58 lap	6 lap	10,34
	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Terlaksananya Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	58 lap	6 lap	10,34

Mengacu pada rencana strategis Tahun 204-2026 serta rencana kerja tahunan, Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang Tahun 2025 berdasarkan Permendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah melaksanakan 2 program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota meliputi 9 kegiatam dengan 32 sub kegiatan dan Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD meliputi 8 kegiatan dengan 27 sub kegiatan yang dilaksanakan oleh empat bagian lingkup Sekretariat DPRD. Evaluasi pelaksanaan rencana kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang dapat dilihat seperti dibawah.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2025
Kabupaten Tangerang

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja SKPD Tahun (2025)	Realisasi Renja SKPD Tahun (2025)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4.02.001	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	100%	23,16	100%	23,16	23,16	100		
		Persentase pemenuhan administrasi kepegawaiaan dan umum	100%	24,07	100%	24,07	24,07	100		
		Prosentase pemenuhan administrasi keuangan dan program	100%	24,75	100%	24,75	24,75	100		
4.02.001.201	Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8	8	8	25.00%	25.00%	100		
		Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	100%	100%	100%	25%	112,23	100		
4.02.001.201.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		3 dok	3 dok	1 dok	33,33	3 dok		
4.02.001.201.02	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1 dok	1 dok	0 dok	0	1 dok		

4.02.001.2 01.03	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1 dok	1 dok	0 dok	0	1 dok		
4.02.001.2 01.04	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		1 dok	1 dok	0 dok	0	1 dok		
4.02.001.2 01.05	Koordinasi dan penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		1 dok	1 dok	0 dok	0	1 dok		
4.02.001.2 01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi		1 dok	1 dok	1 dok	100	1 dok		
4.02.001.2 02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah laporan keuangan		1 lap	1 lap	0 dok	0	1 lap		
		Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	93,94	100	50,96	50,96	100%		
4.02.001.2 02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		52 orang/bulan	52 orang/bulan	40 orang/bulan	76,92	52 orang/bulan		
4.02.001.2 02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 lap	1 dok	0 dok	0	1 lap		
4.02.001.2 02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan/Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD		4 dok	8 dok	2 dok	25,00	8 dok		

4.02.001.205	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Jumlah pegawai yang difasilitasi		68 orang	50 orang	9 orang	18,00	135 orang		
		Prosentase aparatur yang meningkat kapasitasnya		95,33	100	18,00	18,00	100		
4.02.001.205.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		233 paket	1 paket	0 paket	0	1 paket		
4.02.001.205.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		68 orang	50 orang	9 orang	18,00	135 orang		
4.02.001.206	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah		134 paket	7 paket	2 paket	28,57	7 paket		
		Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah		99,82	100	25	25,00	100		
4.02.001.206.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		12 paket	1 paket	1 paket	100	1 paket		
4.02.001.206.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		134 paket	7 paket	2 paket	28,57	7 paket		
4.02.001.206.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		13940 paket	7 paket	2 paket	28,57	7 paket		
4.02.001.206.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan"		3570 paket	1 paket	1 paket	100	1 paket		
4.02.001.206.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		1835 paket	4 paket	1 paket	25,00	4 paket		
4.02.001.206.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan-Perundang-Undangan yang Disediakan		4 dok	4 dok	3 dok	75,00	4 dok		
4.02.001.206.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		465 laporan	1969 laporan	493 laporan	25,00	1969 laporan		

4.02.001.2 06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		768 laporan	90 laporan	22 laporan	24,64	90 laporan		
4.02.001.2 07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah barang milik daerah		1894 unit	2 unit	1 unit	50,00	2 unit		
		Prosentase pemenuhan barang milik daerah		99,89	100	50,00	50,00	100		
4.02.001.2 07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		1894 unit	2 unit	1 unit	50,00	2 unit		
4.02.001.2 08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Tersedianya Jasa Penunjang		12 laporan	12 laporan	3 laporan	25,00	12 laporan		
		Persentase pemenuhan Jasa Penunjang		100	100	25,00	25,00	100%		
4.02.001.2 08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 laporan	10 laporan	0 laporan	0	10 laporan		
4.02.001.2 08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 laporan	12 laporan	3 laporan	25,00	12 laporan		
4.02.001.2 09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1 unit	2 unit	1 unit	100	1 unit		
		Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah		100	100	25,00	25,00	100		
4.02.001.2 09.01	Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		15 unit	18 unit	18 unit	100	18 unit		
4.02.001.2 09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara		16 unit	3 unit	0 unit	0	3 unit		
4.02.001.2 09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		50 unit	15 unit	3 unit	20,00	15 unit		
4.02.001.2 09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		1 unit	2 unit	1 unit	100	1 unit		

		yang Dipelihara/ Direhabilitasi								
4.02.001.2 09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi		183 unit	25 unit	0 unit	0	1 unit		
4.02.001.2 15	**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	Tersedianya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		50 orang	55 orang	55 orang	100	55 orang		
		Persentase Pemenuhan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD			100	25,00	25,00	100%		
4.02.001.2 15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD		50 orang	55 orang	55 orang	100	55 orang		
4.02.001.2 15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan		330 paket	1 paket	2 paket	0	1 paket		
4.02.001.2 15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD		48 orang	55 orang	0 orang	0	55 orang		
4.02.001.2 16	**Layanan Administrasi DPRD**	Tersedianya Fasilitasi Rapat dan Koordinasi DPRD		52 lap	58 lap	6 lap	10,34	58 lap		
		Persentase pemenuhan rapat dan koordinasi DPRD		54,74	100	10,34	10,34	100		
4.02.001.2 16.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD		52 lap	58 lap	6 lap	10,34	58 lap		
4.02.002	**Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD**	Prosentase pemenuhan dukungan pelaksanaan fasilitasi penganggaran dan pengawasan	100	83,16	100	25,00	25,00	100		
		Prosentase pemenuhan dukungan pelaksanaan persidangan dan perundang-undangan								
4.02.002.2 01	**Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**	Terlaksananya Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD		5 dok	8 dok	0 dok	0	12 dok		

		Persentase Pemenuhan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD		92,86	100	25,00	25,00	100		
4.02.002.2 01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah		6 lap	2 lap	0 lap	0	2 lap		
4.02.002.2 01.02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah		5 dok	8 dok	0 dok	0	12 dok		
4.02.002.2 01.04	Fasilitasi Penyusunan Pejelasan/ Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi		4 dok	3 dok	0 dok	0	8 dok		
4.02.002.2 01.05	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun		1 dok	0 dok	1 dok	0	1 dok		
4.02.002.2 02	**Pembahasan Kebijakan Anggaran**	Terlaksananya Pembahasan Kebijakan Anggaran		5 dok	5 dok	0 dok	0,00	5 dok		
		Persentase Pemenuhan Pembahasan Kebijakan Anggaran		83,33	100	0,00	0,00	100		
4.02.002.2 02.01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS		1 dok	1 dok	0 kali	0	1 dok		
4.02.002.2 02.02	Pembahasan Perubahan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS		1 dok	1 dok	0 kali	0	1 dok		
4.02.002.2 02.03	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD		1 dok	1 dok	0 kali	0	1 dok		
4.02.002.2 02.04	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan		1 dok	1 dok	0 kali	0	1 dok		
4.02.002.2 02.05	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester		0 dok	0 dok	0 dok	0	2 dok		
4.02.002.2 02.06	Pembahasan Pertanggung Jawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggung jawaban APBD		1 dok	1 dok	0 kali	0	1 kali		

4.02.002.2 03.01	**Pengawasan Penyelengaraan Pemerintahan**	Terselenggaranya Pengawasan Kinerja Pemerintahan		16 lap	16 lap	4 lap	25,00	16 lap		
		Persentase pemenuhan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan		83,33	100	25,00	25,00	100		
4.02.002.2 03.02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum		4 lap	4 lap	1 lap	25,00	4 lap		
4.02.002.2 03.03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur		4 lap	4 lap	1 lap	25,00	4 lap		
4.02.002.2 03.03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat		4 lap	4 lap	1 lap	25,00	4 lap		
4.02.002.2 03.04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian		4 lap	4 lap	1 lap	25,00	4 lap		
4.02.002.2 03.06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan		1 lap	1 lap	0 lap	0	1 lap		
4.02.002.2 03.07	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah		1 lap	1 lap	0 lap	0	1 lap		
4.02.002.2 04	**Peningkatan Kapasitas DPRD**	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas DPRD		1 dok	1 dok	0 dok	0	1 dok		
		Persentase pemenuhan Peningkatan Kapasitas DPRD		76,43	100	29,88	29,88	100		
4.02.002.2 04.02	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD		6 dok	6 dok	2 dok	33,33	6 dok		
4.02.002.2 04.02	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli		-	4 org	0 org	0	4 org		
4.02.002.2 04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD		12 dok	430 dok	108 dok	25,00	430 dok		

4.02.002.2 04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi		8 orang	8 orang	8 orang	100	8 orang		
4.02.002.2 04.06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat		42 dok	100 dok	21 dok	21,00	100 dok		
4.02.002.2 04.07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD		1 dok	1 dok	0 dok	0	1 dok		
4.02.002.2 05	**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	Terlaksananya Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		2 dok	165 dok	55 dok	33,33	3 dok		
		Persentase Pelaksanaan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		80,83	100	25,00	25,00	100%		
4.02.002.2 05.01	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD		10 lap	3 lap	1 lap	33	3 lap		
4.02.002.2 05.02	Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun		17 dok	110 dok	55 dok	50.00	165 dok		
4.02.002.2 05.03	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses		2 dok	165 dok	55 dok	33,33	3 dok		
4.02.002.2 06	**Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**	Terlaksananya Penyusunan Kode Etik DPRD		1 dok	1	-	-	1 dok		
		Persentase Penyusunan Kode Etik DPRD		100	100	-	-	-		
4.02.002.2 06.01	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD		1 dok	1	-	-	1 dok		
4.02.002.2 07	**Pembahasan Kerja Sama Daerah**	Terlaksananya Komunikasi dan Publikasi		12 dok	360 dok	90 dok	25,00	360 dok		
		Persentase pemenuhan komunikasi dan publikasi		100	100	25,00	25,00	100%		
4.02.002.2 07.02	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun		12 dok	360 dok	90 dok	25,00	360 dok		
4.02.002.2 08	**Fasilitasi Tugas DPRD**	Terlaksananya fasilitasi tugas DPRD		1 dok	1 dok	0 dok	0	1 dok		
		Prosentase pemenuhan fasilitasi tugas DPRD		85,58	100	25,00	25,00	100%		

4.02.002.2 08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD		12 dok	119 dok	25 dok	21,00	119 dok		
4.02.002.2 08.02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun		1 dok	1 dok	0 dok	0	1 dok		
4.02.002.2 08.03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah		11 dok	12 dok	3 dok	25,00	26 dok		
4.02.002.2 08.04	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah		4 dok	2 dok	0 dok	0	4 dok		

Berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Pada Tahun Anggaran 2025 Sekretariat DPRD melaksanakan 2 progam yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas 9 kegiatan dengan 32 sub kegiatan dan Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD terdiri atas 8 kegiatan dengan 27 sub kegiatan. Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja yang dituangkan dalam program dan kegiatan seperti tabel diatas seluruhnya telah dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD yaitu memfasilitasi tugas, fungsi dan wewenang DPRD dalam melaksanakan berbagai aktivitasnya.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025 terdapat beberapa permasalahan dan kendala yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian target realisasi antara lain:

a. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya sesuai dengan kerusakan dan pemeliharan rutin yang dilaksanakan;
b. Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan sesuai pengajuan perawatan dan kerusakan kendaraan dinas;
c. Pelaksanaan medical check up pimpinan dan anggota DPRD dialokasikan untuk 55 orang anggota, sampai dengan triwulan I belum ada pengajuan dari anggota dewan untuk menjalankan general check up;
d. Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD, adanya rapat-rapat paripurna yang pelaksanaannya digabung dalam satu hari pelaksanaan;
e. Pembahasan 8 Raperda yang semula direncanakan 4 raperda pada triwulan II namun terjadi perubahan pembahasan pada triwulan III dan IV hal ini disebabkan ketidaksiapan perangkat daerah pengusung;
f. Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik ditarget 4 kali namun usulan raperda inisiatif belum diusulkan secara pasti oleh komisi atau anggota DPRD;
g. Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD hasil fasilitasi pelaksanaan reses belum seluruhnya diinput dalam SIPD sehingga Bappeda mengalami kesulitan melakukan eksekusi;
h. Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD luar daerah lebih banyak menggunakan lumpsum 30% untuk penginapan.

Dalam pelaksanaan seluruh program dan kegiatan tentunya banyak penyebab, kendala, hambatan ketidak berhasilan tercapainya program dan kegiatan maupun pendukung, pendorong dan penunjang tercapainya pelaksanaan program dan kegiatan.

Faktor-faktor Tidak Tercapainya/Terpenuhinya atau Melebihi Target Kinerja

No.	Faktor-faktor Penyebab	Tidak Tercapai Target	Terpenuhi Target	Melebihi Target
1.	Perencanaan dan anggaran	Belum Optimal	Optimal	Optimal

No.	Faktor-faktor Penyebab	Tidak Tercapai Target	Terpenuhi Target	Melebihi Target
2.	SOP kegiatan dan sub kegiatan	Belum seluruhnya ada SOP	Adanya SOP kegiatan dan sub kegiatan	Berjalannya SOP dengan baik
3.	Koordinasi antar bagian dan sub bagian	Belum Maksimal	Peningkatan koordinasi antar bagian sub bagian	Optimalisasi koordinasi antar bagian sub bagian
4.	Pendidikan dan Pelatihan	Kurangnya Bintek	Peningkatan Bintek	Peningkatan Bintek
5.	Pelaksanaan Program dan Kegiatan	Belum Sesuai Jadwal	Sesuai Jadwal	Sesuai Jadwal
6.	Harmonisasi Pelaksanakan Pembahasan Perda	Belum Optimal	Optimal	Optimal
7.	Monitoring dan Evaluasi	Kurangnya Monitoring dan Evaluasi	Berjalannya Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi	Peningkatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tentunya akan menimbulkan implikasi terhadap pencapaian program renstra antara lain :

1. Faktor perencanaan dan anggaran berimplikasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang tidak tepat waktu dan tidak terserapnya sebagian atau seluruh anggaran yang direncanakan.
2. Faktor SOP berimplikasi pada kurang optimalnya pelaksanaan program dan kegiatan disebabkan belum adanya standar kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi pedoman pemahaman pelaksanaan program dan kegiatan.
3. Faktor Koordinasi berimplikasi pada lemahnya komunikasi, sinergitas dan integritas yang berdampak pada kurang optimalnya dalam peningkatan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan maupun pada pelaksanaan kinerja sesuai tupoksinya.
4. Faktor pendidikan dan pelatihan formal berimplikasi pada kurang pemahaman dan profesionalime aparatur terhadap pelaksanaan kinerja baik program dan kegiatan serta kurangnya bintek menyebabkan ketrampilan dan kemampuan tidak ada peningkatan.
5. Faktor pelaksanaan program dan kegiatan berimplikasi pada belum sesuainya jadwal berakibat target pelaksanaan program dan kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana, kemungkinan terjadi pengurangan anggaran ataupun tidak terserapnya anggaran.
6. Faktor Harmonisasi berakibat belum optimalnya pelaksanaan pembahasan raperda.
7. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkesinambungan pada program dan kegiatan.

Mencermati hal itu serta untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut agar tidak menjadi kendala dan permasalahan serta meminimalisir faktor penyebab, Sekretariat DPRD berusaha melakukan kebijakan perencanaan dan penganggaran sebagai berikut :

1. Peningkatan perencanaan program dan kegiatan secara menyeluruh pada setiap bagian lingkup Sekretariat DPRD.
2. Mencermati pengelolaan anggaran secara tepat guna dan tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan.
3. Peningkatan program dan kegiatan melalui pelaksanaan kegiatan yang tepat waktu sesuai rencana yang ditetapkan.
4. Peningkatan koordinasi dan komunikasi antar bagian lingkup Sekretariat DPRD maupun dengan instansi/badan/lembaga terkait lainnya.
5. Peningkatan penatausahaan keuangan yang transparan dan akuntabel.
6. Peningkatan harmonisasi dalam pelaksanaan dan pembahasan raperda.
7. Peningkatan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan.

Rekapitulasi Capaian Pelaksanaan Renja Triwulan I Tahun 2025

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja SKPD Tahun (2025)	Realisasi Renja SKPD Tahun (2025)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4.02.001	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	100%	23,16	100%	23,16	23,16	100		
		Persentase pemenuhan administrasi kepegawaiaan dan umum	100%	24,07	100%	24,07	24,07	100		
		Prosentase pemenuhan administrasi keuangan dan program	100%	24,75	100%	24,75	24,75	100		
4.02.001.201	Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		8 dok	8 dok	2 dok	25,00	8 dok		
		Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	100%	100%	100%	25%	112,23	100		
4.02.001.201.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		3 dok	3 dok	1 dok	33,33	3 dok		
4.02.001.201.02	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1 dok	1 dok	0 dok	0	1 dok		
4.02.001.201.03	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan		1 dok	1 dok	0 dok	0	1 dok		

		Dokumen Perubahan RKA-SKPD								
4.02.001.2 01.04	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		1 dok	1 dok	0 dok	0	1 dok		
4.02.001.2 01.05	Koordinasi dan penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		1 dok	1 dok	0 dok	0	1 dok		
4.02.001.2 01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi		1 dok	1 dok	1 dok	100	1 dok		
4.02.001.2 02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah laporan keuangan		1 lap	1 dok	0 dok	0	1 dok		
		Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	93,94	100	22,22	22,22	100%		
4.02.001.2 02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		55 orang/bulan	60 orang/bulan	40 orang/bulan	66,66	60 orang/bulan		
4.02.001.2 02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 lap	1 dok	0 dok	0	1 dok		
4.02.001.2 02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan/Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD		4 dok	8 dok	2 dok	25,00	8 dok		
4.02.001.2 05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Jumlah pegawai yang difasilitasi		68 orang	135 orang	9 orang	6,66	135 orang		
		Prosentase aparatur yang meningkat kapasitasnya		95,33	100	23,75	23,75	100		

4.02.001.2 05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		233 paket	5 paket	0 paket	0	5 paket		
4.02.001.2 05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		68 orang	135 orang	9 orang	6,66	135 orang		
4.02.001.2 06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah		134 paket	7 paket	2 paket	28,57	7 paket		
		Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah		99,82	100	25	25,00	100		
4.02.001.2 06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		12 paket	2 paket	1 paket	50,00	2 paket		
4.02.001.2 06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		134 paket	7 paket	2 paket	28,57	7 paket		
4.02.001.2 06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		13940 paket	7 paket	2 paket	28,57	7 paket		
4.02.001.2 06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		3570 paket	2 paket	2 paket	100	2 paket		
4.02.001.2 06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		1835 paket	2 paket	1 paket	50,00	2 paket		
4.02.001.2 06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		4 dok	16 dok	3 dok	18,75	16 dok		
4.02.001.2 06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		465 laporan	108 laporan	27 laporan	25,00	108 laporan		
4.02.001.2 06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		768 laporan	856 laporan	211 laporan	24,64	856 laporan		
4.02.001.2 07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah barang milik daerah		1894 unit	132 unit	103 unit	78,03	132 unit		

		Prosentase pemenuhan barang milik daerah		99,89	100	25,00	25,00	100		
4.02.001.207.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		1894 unit	132 unit	103 unit	78,03	132 unit		
4.02.001.208	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Tersedianya Jasa Penunjang		12 laporan	12 laporan	3 laporan	25,00	12 laporan		
		Persentase pemenuhan Jasa Penunjang		100	100	12,50	12,50	100%		
4.02.001.208.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 laporan	12 laporan	0 laporan	0	12 laporan		
4.02.001.208.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 laporan	12 laporan	3 laporan	25,00	12 laporan		
4.02.001.209	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1 unit	2 unit	1 unit	50,00	2 unit		
		Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah		100	100	25,00	25,00	100		
4.02.001.209.01	Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		15 unit	23 unit	23 unit	100	23 unit		
4.02.001.209.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara		16 unit	19 unit	2 unit	10,53	16 unit		
4.02.001.209.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		50 unit	45 unit	10 unit	22,22	45 unit		
4.02.001.209.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi		1 unit	2 unit	1 unit	50,00	2 unit		
4.02.001.209.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi		183 unit	25 unit	5 unit	20,00	25 unit		

4.02.001.215	**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	Tersedianya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		55 orang	55 orang	55 orang	100	55 orang		
		Persentase Pemenuhan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		100	100	25,00	25,00	100		
4.02.001.215.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD		55 orang	55 orang	55 orang	100	55 orang		
4.02.001.215.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan		330 paket	5 paket	1 paket	20,00	5 paket		
4.02.001.215.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD		48 orang	55 orang	0 orang	0	55 orang		
4.02.001.216	**Layanan Administrasi DPRD**	Tersedianya Fasilitasi Rapat dan Koordinasi DPRD		52 lap	58 lap	6 lap	10,34	58 lap		
		Persentase pemenuhan rapat dan koordinasi DPRD		54,74	100	25,00	25,00	100		
4.02.001.216.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD		52 lap	58 lap	6 lap	10,34	58 lap		
4.02.002	**Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD**	Prosentase pemenuhan dukungan pelaksanaan fasilitasi penganggaran dan pengawasan	100	83,16	100	24,22	24,22	100		
		Prosentase pemenuhan dukungan pelaksanaan persidangan dan perundang undangan								
4.02.002.201	**Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**	Terlaksananya Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD		5 perda	8 perda	0 perda	0	12 perda		
		Persentase Pemenuhan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD		92,86	100	25,00	25,00	100		

4.02.002.2 01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah		6 lap	5 lap	1 lap	20,00	6 lap		
4.02.002.2 01.02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah		5 perda	8 perda	0 perda	0	12 perda		
4.02.002.2 01.04	Fasilitasi Penyusunan Pejelasan/ Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi		4 raperda	3 raperda	0 raperda	0	4 raperda		
4.02.002.2 01.05	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun		1 dok	0 dok	1 dok	0	1 dok		
4.02.002.2 02	**Pembahasan Kebijakan Anggaran**	Terlaksananya Pembahasan Kebijakan Anggaran		5 dok	5 dok	0 kali	0	5 dok		
		Persentase Pemenuhan Pembahasan Kebijakan Anggaran		83,33	100	25,00	25,00	100		
4.02.002.2 02.01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS		1 dok	1 dok	0 kali	0	1 dok		
4.02.002.2 02.02	Pembahasan Perubahan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS		1 dok	1 dok	0 kali	0	1 dok		
4.02.002.2 02.03	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD		1 dok	1 dok	0 kali	0	1 dok		
4.02.002.2 02.04	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan		1 dok	1 dok	0 kali	0	1 dok		
4.02.002.2 02.05	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester		0 dok	0 dok	0 dok	0	0 dok		
4.02.002.2 02.06	Pembahasan Pertanggung Jawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggung jawaban APBD		1 dok	1 dok	0 kali	0	1 kali		
4.02.002.2 03.01	**Pengawasan Penyelengaraan Pemerintahan**	Terselenggaranya Pengawasan Kinerja Pemerintahan		16 lap	16 lap	4 lap	25,00	16 lap		
		Persentase pemenuhan		83,33	100	24,00	24,00	100		

		pengawasan penyelenggaraan pemerintahan								
4.02.002.2 03.02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum		4 lap	4 lap	1 lap	25,00	4 lap		
4.02.002.2 03.03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur		4 lap	4 lap	1 lap	25,00	4 lap		
4.02.002.2 03.03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat		4 lap	4 lap	1 lap	25,00	4 lap		
4.02.002.2 03.04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian		4 lap	4 lap	1 lap	25,00	4 lap		
4.02.002.2 03.06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan		1 lap	1 lap	1 lap	100	1 lap		
4.02.002.2 03.07	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah		1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok		
4.02.002.2 04	**Peningkatan Kapasitas DPRD**	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas DPRD		1 dok	1 dok	0 dok	0	1 dok		
		Persentase pemenuhan Peningkatan Kapasitas DPRD		76,43	100	19,56	19,56	100		
4.02.002.2 04.02	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD"		6 dok	6 dok	2 dok	33,33	6 dok		
4.02.002.2 04.02	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli		-	4 org	0 org	0	4 org		
4.02.002.2 04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD		12 dok	430 dok	108 dok	25,11	430 dok		
4.02.002.2 04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi		8 orang	8 orang	8 orang	100	8 orang		
4.02.002.2 04.06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat		42 dok	114 dok	25 dok	21,92	114 dok		

4.02.002.2 04.07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD		1 dok	1 dok	0 dok	0	1 dok		
4.02.002.2 05	**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	Terlaksananya Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		2 dok	165 dok	55 dok	33,33	165 dok		
		Persentase Pelaksanaan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		80,83	100	25,00	25,00	100%		
4.02.002.2 05.01	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Jumlah Laporan HasilKunjungan Kerja DPRD		10 lap	55 lap	55 lap	100	55 lap		
4.02.002.2 05.02	Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun		17 dok	110 dok	55 dok	50,00	110 dok		
4.02.002.2 05.03	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses		2 dok	165 dok	55 dok	33,33	165 dok		
4.02.002.2 06	**Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**	Terlaksananya Penyusunan Kode Etik DPRD		1 dok	1	-	-	1 dok		
		Persentase Penyusunan Kode Etik DPRD			100					
4.02.002.2 06.01	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD		1 dok	1	-	-	1 dok		
4.02.002.2 07	**Pembahasan Kerja Sama Daerah**	Terlaksananya Komunikasi dan Publikasi		12 dok	24 dok	6 dok	25,00	24 dok		
		Persentase pemenuhan komunikasi dan publikasi		100	100	25,00	25,00	100%		
4.02.002.2 07.02	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Tersusunnya Bahan Komunikasi dan Publikasi		12 dok	24 dok	6 dok	25,00	24 dok		
4.02.002.2 08	**Fasilitasi Tugas DPRD**	Terlaksananya fasilitasi tugas DPRD		1 dok	1 dok	0 dok	0	1 dok		
		Prosentase pemenuhan fasilitasi tugas DPRD		85,58	100	25,00	25,00	100%		
4.02.002.2 08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD		12 dok	119 dok	25 dok	21,00	119 dok		
4.02.002.2 08.02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan		1 dok	1 dok	0 dok	0	1 dok		

		Kinerja DPRD yang Disusun								
4.02.002.2 08.03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah		11 dok	12 dok	3 dok	25,00	18 dok		
4.02.002.2 08.04	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah		4 dok	2 dok	0 dok	0	2 dok		

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Mengacu pada realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan, pencapaian kinerja Sekretariat DPRD berdasarkan indikator kinerja seluruh program dan kegiatan baik :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota hasil kinerjanya pada triwulan I dengan indikator kinerja Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan telah mencapai 23,16%.
b. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD hasil kinerjanya pada triwulan I dengan indikator kinerja Persentase pemenuhan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD telah mencapai 24,22%. Yang memang langsung memfasilitasi fungsi, tugas dan wewenang DPRD telah dilaksanakan dengan indikator sebagai berikut.

2.2.1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
   Indikator : Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
   Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
   Indikator : Tersedianya dokumen perencanaan perangkat daerah
   Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
   Indikator : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
   Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
   Indikator : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
   Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
   Indikator : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
   Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
   Indikator : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
   Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
   Indikator : Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   Indikator : Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan.
   Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   Indikator : Tersedianya gaji dan tunjangan ASN
   Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhit Tahun.
   Indikator : Tersusunnya keuangan akhir tahun dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD.

c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
   Indikator : Jumlah Pegawai Yang difasiltasi.

Sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya.
Indikator : Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya
Sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.
Indikator : Terlaksananya pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi

d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Indikator : Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah.
Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Indikator : Tersedianya komponan instalasi listrik/penerangan bangunan kantor .
Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
Indikator : Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor.
Sub kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.
Indikator : Tersedianya peralatan rumah tangga
Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.
Indikator : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan.
Sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Indikator : Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.
Sub kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu.
Indikator : Tersedianya fasilitasi kunjungan tamu.
Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
Indikator : Terselenggaranya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultansi SKPD

e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Umum.
Indikator : Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah.
Sub kegiatan Pengadaan Mebel.
Indikator : Tersedianya mebel

f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Indikator : Tersedianya Jasa Penunjang
Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik.
Indikator : Tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik.
Sub kegiayan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Indikator : Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor.

g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
Indikator : Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan.
Indikator : Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya.
Sub kegiatan Pemeliharaan Mebel
Indikator : Terlaksananya pemeliharaan mebel.

Sub kegiatan Peralatan dan Mesin Lainnya
Indikator : Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya.
Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Indikator : Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor dan bangunan lainnya
Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
Indikator : Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya.

h. Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
Indikator : Terlaksananya Layanan Gaji dan Tunjangan DPRD.
Sub kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD.
Indikator : Tersedianya hak keuangan DPRD.
Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up DPRD.
Indikator : Terlaksananya medical check up DPRD

i. Kegiatan Layanan Administrasi DPRD.
Indikator : Tersedianya Rapat dan Konsultasi DPRD.
Sub kegiatan Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD.
Indikator : Terlaksananya fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi DPRD.

2.2.2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

a. Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
Indikator : Terlaksananya Pembahasan dan Pembentukan Raperda.
Sub kegiatan Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah.
Indikator : Terlaksananya penyusunan dan pembahasan program pembentukan peraturan daerah.
Sub kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
Indikator : Terlaksananya pembahasan rancangan peraturan daerah.
Sub kegiatan Fasiltasi Penyusunan Penjelasana/ Kerterangan dan/atau Naskah Akademik.
Indikator : Terlaksananya fasilitasi penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.
Sub kegiatan Penyusunan Tata Tertib
Indikator : Tersusunnya tata tertib DPRD.

b. Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran.
Indikator : Terlaksananya Pembahasan dan Penetapan Rencana Anggaran
Sub kegiatan Pembahasan KUA dan PPAS.
Indikator : Terlaksananya pembahasan KUA dan PPAS
Sub kegiatan Pembahasan Perubahan KUA dan PPAS.
Indikator : Terlaksananya pembahasan perubahan KUA dan PPAS
Sub kegiatan Pembahasan APBD.
Indikator : Terlaksananya pembahasan APBD
Sub kegiatan Pembahasan APBD Perubahan.
Indikator : Terlaksananya pembahasan APBD perubahan
Sub kegiatan Pembahasan Laporan Semesteran

Indikator : Terlaksananya hasil pembahasan realisasi peralaksana APBD per semester.
Sub kegiatan Pembahasan Pertanggung jawaban APBD.
Indikator : Terlaksananya pembahasana pertanggung jawaban APBD

c. Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Indikator : Terselenggaranya Pengawasan Kinerja Pemerintahan.
Sub kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dna Hukum.
Indikator : Terlaksananya pengawasan urusan bidang pemerintahan dan hukum
Sub kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur
Indikator : Terlaksananya pengawasan urusan bidang infrastruktur.
Sub kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat.
Indikator : Terlaksananya pengawasan urusan bidang kesejahteraan rakyat.
Sub kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian
Indikator : Terlaksananya pengawasan urusan bidang perekonomian.
Sub kegiatan Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
Indikator : Terlaksananya pengawasan tindak lanjut pemeriksaan keuangan oleh BPK.

d. Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD
Indikator : Terlaksananya Pemenuhan Fasilitasi Kapasitas DPRD.
Sub kegiatan Pendalaman Tugas DPRD
Indikator : Terlaksananya pendalaman tugas DPRD.
Sub kegiatan Publikasi dan Dokumentasi Dewan
Indikator : Terlaksananya penyebarluasan produk hukum daerah, publikasi dokumentasi dewan.
Sub kegiatan Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli.
Indikator : Tersedianya kelompok pakar dan tim ahli.
Sub kegiatan Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi
Indikator : Tersedianya tenaga ahli fraksi.
Sub kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat.
Indikator : Terselenggaranya hubungan masyarakat
Sub kegiatan Penyusunan Program Kerja DPRD
Indikator : Tersusunnya rencana kerja DPRD.

e. Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
Indikator : Jumlah Laporan Hasil Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat.
Sub kegiatan Kunjungan Kerja Dalam Daerah
Indikator : Jumlah laporan hasil kunjungan kerja DPRD
Sub kegiatan Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD
Indikator : Tersusunnya pokok-pokok pikiran DPRD
Sub kegiatan Pelaksanaan Reses.
Indikator : Terlaksananya reses.

f. Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik.
   Indikator : Terlaksananya Pealaksanaan Kode Etik DPRD
   Sub kegiatan Penyusunan Kode Etik DPRD.
   Indikator : Tersusunnya kode etik dan tata beracara DPRD.

g. Kegiatan Pembahasan Kerja Sama Daerah.
   Indikator : Terlaksananya Komunikasi dan Publikasi.
   Sub kegiatan Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi.
   Indikator : Tersusunnya bahan komunikasi dan publikasi.

h. Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD
   Indikator : Terlaksananya Fasilitasi Tugas DPRD
   Sub kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD
   Indikator : Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD
   Sub kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja DPRD
   Indikator : Tersusunnya laporan fraksi, alat kelengkapan dan kinerja DPRD.

Indikator tersebut diatas adalah indikator Renstra Tahun 2024-2026 yang mengacu RPD Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026.

Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD merupakan program dan kegiatan yang didalamnya terdapat program prioritas yaitu Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD salah satu kegiatannya adalah Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, sedangkan seluruh pencapaian indikator kegiatan dan sub kegiatan seperti tabel berikut:

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Program Pelayanan Sekretariat DPRD
Kabupaten Tangerang

No.	Indikator	Indikator Kinerja, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	IKK	Target Renstra SKPD			Realisasi Capaian			Proyeksi	Catatan Analisis
				2024	2025	2026	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan									
1.	**Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dok	8	8	8	8	2		8	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dok	3	3	3	3	1		3	
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dok	1	1	1	1	0		1	
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen PerubahanRKA-SKPD"	Dok	1	1	1	1	0		1	
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD"	Dok	1	1	1	1	0		1	
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dok	1	1	1	1	0		1	
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	dok	1	1	1	1	1		1	
2.	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah laporan keuangan	Dok	6	10	10	6	2			
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Dok	1	1	1	1	0		1	
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dok	1	1	1	1	0		1	
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Dok	4	8	8	4	2		8	
3.	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Jumlah pegawai yang difasilitasi	Pkt/org	283	140	140	301				
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	pkt	233	5	5	233	0		5	
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	68	135	135	68	9		135	
4.	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah		20728	1000	1000	20728	249			

		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	12	2	2	12	1		2	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	134	7	7	134	2		7	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	13940	7	7	13940	2		7	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	3570	2	2	3570	2		2	
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket	1835	2	2	1835	1		2	
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dok	4	16	16	4	3		16	
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	laporan	465	108	108	465	27		108	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	768	856	856	768	211		856	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah		1896	132	132	1894	103			
		Jumlah Paket Mebel yangDisediakan	unit	1896	132	132	1894	103		3	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang		24	12	12	24	3			
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	lap	12	0	0	12	0		0	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	lap	12	12	12	12	3		12	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		265	114	114	265	41			
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	15	23	23	15	23		23	
		Jumlah Mebel yang Dipelihara	unit	16	19	19	16	2		19	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	50	45	45	50	10		45	
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	unit	1	2	2	1	1		2	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	unit	183	25	25	183	5		25	
	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Tersedianya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		110	110	110	103	55			
		Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	Orang atau bulan	55	55	55	55	55		50	
		Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	paket	5	5	5	5	1			
		Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	Orang	55	55	55	48	0		55	

	Layanan Administrasi DPRD	Tersedianya Fasilitasi Rapat dan Koordinasi DPRD		95	58	58	52	6			
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	lap	95	58	58	52	6			
	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase pemenuhan tugas dan fungsi DPRD									
	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Terlaksananya Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD		17	16	18	15	1			
		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	lap	6	5	5	6	1		2	
		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Perda	7	8	9	5	0		10	
		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	Dok	4	3	4	4	0		4	
		Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	Dok	1	0	1	1	0		1	
	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Terlaksananya Pembahasan Kebijakan Anggaran		6	5	6	5	1			
		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	Dok	1	1	1	1	0		1	
		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Dok	1	1	1	1	0		1	
		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Dok	1	1	1	1	0		1	
		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	Dok	1	1	1	1	0		1	
		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	lap	1	0	1	0	0		1	
		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggung jawaban APBD	Dok	1	1	1	1	1		1	
	Pengawasan Penyelengaraan Pemerintahan	Terselenggaranya Pengawasan Kinerja Pemerintahan		16	16	16	16	4			
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	lap	4	4	4	4	1		4	
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	lap	4	4	4	4	1		4	
		Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	lap	4	4	4	4	1		4	
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	lap	4	4	4	4	1		4	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	lap	-	-	-	-	-		-	
		Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Lap	1	1	1	1	1			

	Peningkatan Kapasitas DPRD	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas DPRD									
		Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Kali	6	6	6	6	2		7	
		Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Kali dan Bulan	12	430	430	12	108		12	
		Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	orang	2	4	4	0	0			
		Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	orang	8	8	8	8	8		8	
		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Kali	50	144	144	42	25		732	
		Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	Dok	1	1	1	1	0		1	
	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Terlaksananya Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat									
		Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD"	Lap	10	55	55	10	55		55	
		Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	Dok	50	110	110	17	55		110	
		Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Dok	2	165	165	2	55		3	
	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Terlaksananya Penyusunan Kode Etik DPRD									
		Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	Dok	1	0	1	1	0		1	
	Pembahasan Kerja Sama Daerah	Terlaksananya Komunikasi dan Publikasi									
		Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	Dok	12	24	24	12	6		360	
	Fasilitasi Tugas DPRD	Terlaksananya fasilitasi tugas DPRD									
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Dok	12	119	119	12	25		1296	
		Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	Dok	1	1	1	1	0		1	
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Dok	26	12	12	12	3			
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Dok	4	2	2	4	0			

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD

Berdasarkan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang, secara organisatoris dan manajerial Sekretariat DPRD merupakan fasilitator tugas, fungsi dan kewenangan DPRD, dituangkan dalam Rencana Kerja Tahunan DPRD baik bersifat rutinitas maupun program dan kegiatan yang telah direncanakan.

Fasilitasi yang diberikan Sekretariat DPRD terhadap pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan DPRD dilandaskan pada pelayanan prima dengan memperhatikan kebutuhan yang mampu mendukung kegiatan DPRD sehingga kinerja DPRD dapat dicapai optimal.

Pelayanan prima merupakan pelayanan yang berdimensi pada ketepatan waktu, kelayakan pelayanan, keramahan dan kesopanan, pelayanan yang cepat, pelayanan terhadap kecepatan informasi, profesionalisme SDM dan pelayanan terkait dengan kondisi dan lingkungan tempat aktivitas akan dilaksanakan.

Sekretariat DPRD sebagai fasilitator menyadari sepenuhnya akan hal tersebut, semua dimensi telah diupayakan dan dilaksanakan oleh seluruh jajaran Namun demikian dalam rentang pelaksanaan fasilitasi terhadap DPRD terdapat beberapa permasalahan dan hambatan yang mengganggu jalan fasilitasi walaupun secara keseluruhan tidak mengganggu pelaksanaan kinerja DPRD anatara lain :

1. Belum optimalnya perencanaan dan penganggaran disetiap bagian.
2. Belum seluruhnya kegiatan dan sub kegiatan membuat SOP.
3. Belum optimalnya koordinasi baik dengan DPRD, antar bagian maupun dengan instansi/dinas/lembaga lainnya.
4. Kurangnya komunikasi yang berkelanjutan antara DPRD, antar bagian maupun dengan instansi/dinas/lembaga terkait dengan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD.
5. Perlu adanya perbaikan dan peningkatan profesionalisme aparatur baik dari segi kualitas maupun kuantitas.
6. Peningkatan harmonisasi antar instansi/dinas/lembaga terkait dalam pelaksanaan pembahasan raperda.
7. Belum optimalnya monitoring dan evaluasi yang telah dilaksanakan terhadap semua aspek yang menunjang kinerja DPRD.

Memperhatikan permasalahan dan hambatan sebagaimana tersebut diatas, Sekretariat DPRD bersama seluruh jajarannya berupaya melakukan perbaikan melalui perencanaan dan penganggaran yang akurat, tepat dan cepat, meningkatkan koordinasi dan komunikasi, peningkatan profesionalisme aparatur melalui pendidikan formal maupun non formal, peningkatan monitoring dan evaluasi sebelum dan sesudah pelaksanaan kegiatan serta membuat laporan yang akuntabel dan transparan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Pada aspek perencanaan dan anggaran, perlu adanya kematangan dalam rencana anggaran maupun rencana pelaksanaan kegiatan.

2. Pada aspek SOP, setiap bagian dan sub bagian agar membuat SOP untuk menjadi pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi dan acuan pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan.
3. Pada aspek koordinasi, perlu adanya kesinambungan dan kemampuan aparatur dalam melakukan koordinasi.
4. Pada aspek komunikasi, diperlukan peningkatan kemampuan komunikasi aparatur pada semua bidang.
5. Pada aspek SDM, diperlukan peningkatan profesionalisme dari segi kualitas maupun kuantitas.
6. Pada aspek profesionalisme, adanya penempatan pegawai sesuai dengan bidang pendidikan yang dimiliki.
7. Pada aspek monitoring dan evaluasi, optimalisasi monitoring dan evaluasi terhadap check and recheck serta laporan pelaksanaan program dan kegiatan.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 yang diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 050-5889 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah oleh Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, Tahun 2024 Sekretariat DPRD melaksanakan 2 program, 17 kegiaan dan 60 sub kegiatan sedangkan Tahun 2025 DPRD melaksanakan 2 program, 17 Kegiatan dan 59 sub kegiatan.

Berdasarkan Forum OPD/Gabungan Tahun 2024 yang dilaksanakan oleh beberapa Perangkat Daerah lingkup bidang PPM Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang, Sekretariat DPRD untuk Tahun 2025 berdasarkan perhitungan sendiri mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 160.211.397.620,- diarahkan pada 2 program, 17 kegiatan dan 62 sub kegiatan terdiri dari

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dialokasikan sebesar Rp. 87.713.541.476,-
b. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD sebesar Rp. 72.497.856.144,-

Mengacu pada hasil reviu Bappeda dengan memperhatikan tugas dan fungsi Setwan sebagai fasilitasi kegiatan DPRD yang memerlukan alokasi anggaran yang berbeda dari OPD lain tidak terdapat pengurangan maupun penambahan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan, namun Sekretariat DPRD mendapat pengurangan alokasi pagu anggaran yang sudah tercantum dalam SIPD yaitu semula Rp. 160.211.397.620,- menjadi sebesar Rp. 138.551.731.765,- yang merupakan pagu indikatif program, kegiatan dan sub kegiatan untuk Tahun 2025 dialokasikan pada :

a. Gaji dan tunjangan dewan serta ASN Setwan sebesar Rp. 60.551.731.765,-

b. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Dan program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD sebesar sebesar Rp. 78.000.000.000,-

Anggaran tersebut secara keseluruhan belum dihitung secara rill yaitu untuk menunjang fasilitasi tugas dan fungsi DPRD, diperkirakan anggaran tersebut akan bertambah atau berkurang sesuai kebutuhan riil.

Namun demikian saat penyusunan DPA Murni 2025 anggaran di SIPD telah dialokasi anggaran Sekretariat DPRD sebesar Rp. 144.097.518.813,- dengan rincian sebagai berikut :

No.	Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp.)
A.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	87.981.891.541
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	92.718.000
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.066.058.842
3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	807.354.050
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	12.804.254.300
5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.338.834.000
6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	786.667.600
7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.147.711.600
8.	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	55.468.999.149
9.	Layanan Administrasi DPRD	1.469.294.000
B.	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	56.115.627.272
1.	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	1.689.426.800
2.	Pembahasan Kebijakan Anggaran	917.600.000
3.	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	1.593.442.120
4.	Peningkatan Kapasitas DPRD	5.689.487.420
5.	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	9.061.245.000
6.	Pembahasan Kerja Sama Daerah	86.207.500
7.	Fasilitasi Tugas DPRD	37.078.218.432

Terbitnya Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025 memerintahkan agar seluruh pemerintah mulai dari Kementerian/Lembaga Negara/ Gubernur/Bupati dan Wali untuk melakukan efisiensi anggaran APBN dan APBD sebesar 50 persen. Menindaklanjuti arahan tersebut pemerintah daerah Kabupaten Tangerang melalui BPKAD mengeluarkan rincian anggaran belanja setiap perangkat daerah termasuk Sekretariat DPRD agar mengurangi anggaran belanjanya sebesar Rp. 27.501.008.981,- dari anggaran Rp. 144.097.518.813,- menjadi sebesar Rp. 116.596.509.833,- Memasuki anggaran perubahan 2025 Sekretariat DPRD mengusulkan penambahan anggaran kepada Tim APD sebesar Rp. 132.810.688.273,- atau bertambah sebesar Rp. 16.122.693.760,- namun disetujui hanya sebesar Rp. 2.806.109.491,-

Untuk memenuhi fasilitasi tugas dan fungsi DPRD pada anggaran perubahan saat ini telah teralokasikan anggaran sebesar Rp.

119.494.104.004,- dan telah diakomodir dalam SIPD. Alokasi anggaran ini kemungkinan akan bertambah dalam pembahasan KUA PPAS perubahan setelah adanya kesepakatan Tim APD dengan DPRD.

Tabel 2.6
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Perubahan Tahun 2025
Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Tujuan/Sasaran/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Optimalisasi Tata Kelola Kesekretariatn Dalam Memfasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD										
	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Setwan										
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		**Persentase pemenuhan administrasi kepegawaiaan dan umum**	100	**83.619.268.204**	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase pemenuhan administrasi kepegawaiaan dan umum**	100	**83.619.268.204**	
			Prosentase pemenuhan administrasi keuangan dan program	100				**Prosentase pemenuhan administrasi keuangan dan program**	100		
	Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 dok	**62.449.000**	**Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 dok	**62.449.000**	
			Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	100				Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	100		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dok	19.290.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dok	19.290.000	
	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD"	1 dok	8.022.000	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD"	1 dok	8.022.000	
	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dok	8.734.000	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dok	8.734.000	
	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil	1 dok	7.666.000,	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil	1 dok	7.666.000,	

			Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD					Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			
	Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi PenyusunanDokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dok	9.850.000	Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi PenyusunanDokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dok	9.850.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	1 dok	8.887.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	1 dok	8.887.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah laporan keuangan	1 lap	**12.603.102.433**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		Jumlah laporan keuangan	1 lap	**12.603.102.433**	
			Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100				Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 org	12.550.538.433	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 org dok	12.550.538.433	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 lap	13.540.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 lap	13.540.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan/ Triwulan/ Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	8 lap	39.024.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan/ Triwulan/ Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	8 lap	39.024.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah pegawai yang difasilitasi	135 orang	**807.354.050**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		Jumlah pegawai yang difasilitasi	135 orang	**807.354.050**	
			Prosentase aparatur yang meningkat kapasitasnya	100				Prosentase aparatur yang meningkat kapasitasnya	100		
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	5 stel	216.926.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	5 stel	216.926.000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	135 orang	560.039.250	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	135 orang	560.039.250	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	7 paket	**8.592.789.172**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	7 paket	**8.592.789.172**	

			Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100				Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 paket	179.714.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 paket	179.714.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 paket	1.253.716.700	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 paket	1.253.716.700	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	7 paket	432.094.800	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	7 paket	432.094.800	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 paket	375.821.992	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 paket	375.821.992	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	323.983.200	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	323.983.200	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	16 dok	259.753.630	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	16 dok	259.753.630	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	108 lap	510.813.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	108 lap	510.813.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	856 laporan	5.256.891.850	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	856 laporan	5.256.891.850	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah barang milik daerah	132 unit	**1.406.234.000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		Jumlah barang milik daerah	132 unit	**885.900.000**	
			Prosentase pemenuhan barang milik daerah	100				Prosentase pemenuhan barang milik daerah	100		
	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	132 unit	1.406.234.000	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	132 unit	1.406.234.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Tersedianya Jasa Penunjang	12 lap	**971.091.600**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		Tersedianya Jasa Penunjang	12 lap	**971.091.600**	
			Persentase pemenuhan Jasa Penunjang	100				Persentase pemenuhan Jasa Penunjang	100		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 lap	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 lap	0	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	12 lap	971.091.600	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	12 lap	971.091.600	

			Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 unit	**2.429.793.600**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 unit	**2.429.793.600**	
			Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100				Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100		
	Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	23 unit	546.411.600	Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	23 unit	546.411.600	
	Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel yang Dipelihara	19 unit	87.800.000	Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel yang Dipelihara	19 unit	87.800.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	45 item	215.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	45 item	215.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 unit	1.321.582.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 unit	1.321.582.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	25 unit	259.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	25 unit	259.000.000	
	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		Tersedianya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	55 orang	**55.468.999.149**	**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**		Tersedianya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	55 orang	**55.468.999.149**	
			Persentase Pemenuhan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100				Persentase Pemenuhan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100		
	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD		Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	55 orang	53.881.792.249	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD		Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	55 orang	53.881.792.249	
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD		Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	5 pkt	1.392.332.700	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD		Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	5 pkt	1.392.332.700	
	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD		Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	55 orang	194.874.200,	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD		Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	55 orang	194.874.200,	
	Layanan Administrasi DPRD		Tersedianya Fasilitasi Rapat dan Koordinasi DPRD	58 lap	**1.308.344.000**	**Layanan Administrasi DPRD**		Tersedianya Fasilitasi Rapat dan Koordinasi DPRD	58 lap	**1.308.344.000**	
			Persentase pemenuhan rapat dan koordinasi DPRD	100				Persentase pemenuhan rapat dan koordinasi DPRD	100		
	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat	58 lap	1.308.344.000	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat	58 lap	1.308.344.000	

			Koordinasi dan Konsultasi DPRD					Koordinasi dan Konsultasi DPRD			
2.	**Meningkatnya Kinerja Fasilitasi Sekretariat DPRD Terhadap Tugas dan Fungsi DPRD**										
	Meningkatnya Kinerja Fasilitasi rapat - rapat Sekretariat DPRD yang tepat waktu										
	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD		**Prosentase pemenuhan dukungan pelaksanaan fasilitasi penganggaran dan pengawasan**		**35.874.835.800**	**Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD**		**Prosentase pemenuhan dukungan pelaksanaan fasilitasi penganggaran dan pengawasan**		**35.874.835.800**	
			Prosentase pemenuhan dukungan pelaksanaan persidangan dan perundang-undangan	100				**Prosentase pemenuhan dukungan pelaksanaan persidangan dan perundang-undangan**	100		
	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD		Terlaksananya Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	8 dok	1.397.865.800	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD		Terlaksananya Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	8 dok	1.397.865.800	
			Persentase Pemenuhan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	100				Persentase Pemenuhan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	100		
	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	5 dok	256.353.400	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	5 dok	256.353.400	
	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	8 dok	889.512.400	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	8 dok	889.512.400	
	Fasilitasi Penyusunan Pejelasan/ Keterangan dan /atau Naskah Akademik		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/ atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	3 dok	252.000.000	Fasilitasi Penyusunan Pejelasan/ Keterangan dan /atau Naskah Akademik		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/ atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	3 dok	252.000.000	
	Penyusunan Tata Tertib DPRD		Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1 dok	-	Penyusunan Tata Tertib DPRD		Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1 dok	-	
	Pembahasan Kebijakan Anggaran		Terlaksananya Pembahasan Kebijakan Anggaran	5 dok	**739.955.600**	**Pembahasan Kebijakan Anggaran**		Terlaksananya Pembahasan Kebijakan Anggaran	5 dok	**739.955.600**	
			Persentase Pemenuhan Pembahasan Kebijakan Anggaran	100				Persentase Pemenuhan Pembahasan Kebijakan Anggaran	100		
	Pembahasan KUA dan PPAS		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 dok	137.194.600	Pembahasan KUA dan PPAS		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 dok	137.194.600	
	Pembahasan Perubahan KUA dan PPAS		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan	1 dok	137.194.600	Pembahasan Perubahan KUA dan PPAS		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan	1 dok	137.194.600	

			KUA dan Perubahan PPAS					KUA dan Perubahan PPAS			
	Pembahasan APBD		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD"	1 dok	164.007.400	Pembahasan APBD		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD"	1 dok	164.007.400	
	Pembahasan APBD Perubahan		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 dok	164.364.400	Pembahasan APBD Perubahan		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 dok	164.364.400	
	Pembahasan Laporan Semester		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	0 dok	-	Pembahasan Laporan Semester		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	0 dok	-	
	Pembahasan Pertanggung Jawaban APBD		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggung jawaban APBD	1 dok	137.194.600	Pembahasan Pertanggung Jawaban APBD		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggung jawaban APBD	1 dok	137.194.600	
	Pengawasan Penyelengaraan Pemerintahan		Terselenggaranya Pengawasan Kinerja Pemerintahan	16 lap	**1.309.802.320**	**Pengawasan Penyelengaraan Pemerintahan**		Terselenggaranya Pengawasan Kinerja Pemerintahan	16 lap	**1.309.802.320**	
			Persentase pemenuhan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	100				Persentase pemenuhan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	100		
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	4 lap	275.945.680	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	4 lap	275.945.680	
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	4 lap	275.945.680	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	4 lap	275.945.680	
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat		Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	4 lap	275.945.680	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat		Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	4 lap	275.945.680	
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	4 lap	275.945.680	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	4 lap	275.945.680	
	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan		Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	0 dok	=	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan		Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	0 dok	=	
	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah		Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 dok	206.019.600	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah		Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 dok	206.019.600	
	Peningkatan Kapasitas DPRD		Terlaksananya Peningkatan Kapasitas DPRD	1 dok	**5.554.707.480**	**Peningkatan Kapasitas DPRD**		Terlaksananya Peningkatan Kapasitas DPRD	1 dok	**5.554.707.480**	

			Persentase pemenuhan Peningkatan Kapasitas DPRD	100				Persentase pemenuhan Peningkatan Kapasitas DPRD	100		
	Pendalaman Tugas DPRD		Jumlah Dokumen Hasil	6 dok	2.318.649.180	Pendalaman Tugas DPRD		Jumlah Dokumen Hasil	6 dok	2.318.649.180	
	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli		Pendalaman Tugas DPRD	4 orang	323.869.000	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli		Pendalaman Tugas DPRD	4 orang	323.869.000	
	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi		Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	8 orang	773.328.800	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi		Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	8 orang	773.328.800	
	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	144 dok	652.052.00	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	144 dok	652.052.00	
	Penyusunan Program Kerja DPRD		Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 dok	50.767.400	Penyusunan Program Kerja DPRD		Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 dok	50.767.400	
	Publikasi dan Dokumentasi Dewan		Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	430 dok	1.622.195.620	Publikasi dan Dokumentasi DPRD		Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	430 dok	1.622.195.620	
	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		Terlaksananya Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	165 dok	**8.177.581.000**	**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**		Terlaksananya Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	165 dok	**8.177.581.000**	
			Persentase Pelaksanaan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	100				Persentase Pelaksanaan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	100		
	Kunjungan Kerja Dalam Daerah		Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	55 org	28.954.00	Kunjungan Kerja Dalam Daerah		Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	55 org	28.954.00	
	Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD		Jumlah Dokume Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	110 dok	12.092.000	Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD		Jumlah Dokume Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	110 dok	12.092.000	
	Pelaksanaan Reses		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	165 dok	8.036.535.000	Pelaksanaan Reses		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	165 dok	8.036.535.000	
	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD		Terlaksananya Penyusunan Kode Etik DPRD	1 dok	-	**Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**		Terlaksananya Penyusunan Kode Etik DPRD	1 dok	-	
			Persentase Penyusunan Kode Etik DPRD	100				Persentase Penyusunan Kode Etik DPRD	100		
	Penyusunan Kode Etik DPRD		Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	1 dok	-	Penyusunan Kode Etik DPRD		Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	1 dok	-	
	Pembahasan Kerja Sama Daerah		Terlaksananya Komunikasi dan Publikasi	24 dok	**69.611.720**	**Pembahasan Kerja Sama Daerah**		Terlaksananya Komunikasi dan Publikasi	24 dok	**69.611.720**	
			Persentase pemenuhan komunikasi dan publikasi	100				Persentase pemenuhan komunikasi dan publikasi	100		
	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi		Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	24 dok	69.611.720	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi		Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	24 dok	69.611.720	
	Fasilitasi Tugas DPRD		Terlaksananya fasilitasi tugas DPRD	1 lap	**18.625.311.880**	**Fasilitasi Tugas DPRD**		Terlaksananya fasilitasi tugas DPRD	1 lap	**18.625.311.880**	
			Prosentase pemenuhan fasilitasi tugas DPRD	100				Prosentase pemenuhan fasilitasi tugas DPRD	100		

	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	119 dok	18.391.686.280	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	119 dok	18.391.686.280	
	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD		Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	1 lap	99.164.000	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD		Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	1 lap	99.164.000	
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	12 dok	38.502.400	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	12 dok	38.502.400	
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	2 dok	95.959.200	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	2 dok	95.959.200	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 yang diubah dengan Permendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang sebagai fasilitator pelaksanan tugas, fungsi dan kewenangannya DPRD telah memetakan program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2025 baik yang berkaitan langsung dengan kepentingan dewan maupun kegiatan penunjang guna kelancaran dan keberhasilan tugas dan fungsi DPRD.

Pada Tahun Anggaran 2025 Sekretariat DPRD merencanakan akan mengelola program dan kegiatan terdiri atas 2 program, 17 Kegiatan dan 59 sub kegiatan. Dengan demikian Tahun 2025 Sekretariat DPRD tidak menampung serta mengelola kegiatan yang berasal maupun atas usulan pemangku kepentingan, kelompok masyarakat terkait langsung pelayanan provinsi, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi atau dari stakeholder lainnya sebagaimana tergambar pada Tabel dibawah ini :

Tabel 2.7
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2025

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
1.	Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Tangerang	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 dok	
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Tangerang	Jumlah Dokumen Laporan Administrasi Keuangan	12 bln	
3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Tangerang	Jumlah pegawai yang di fasilitasi	60 orang	
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Tangerang	Jumlah Jenis Kegiatan administrasi umum perangkat daerah	9 jenis	
5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Tangerang	Jumlah Barang milik daerah yang diadakan	4 unit	
6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Tangerang	Tersedianya Jasa Penunjang urusan Pemerintah daerah	12 laporan	
7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Tangerang	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5 jenis	
8.	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Kab. Tangerang	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	55 orang	
9.	Layanan Administrasi DPRD	Kab. Tangerang	Tersedianya Fasilitasi Rapat-rapat dan Koordinasi DPRD	58 kali	
	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD				
1.	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Dalam/luar Kab. Tangerang	Terlaksananya Pembentukan Peraturan daerah dan Peraturan DPRD	8 perda	
2.	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Dalam/luar Kab. Tangerang	Terlaksananya Pembahasan Kebijakan Anggaran	4 kali	
3.	Pengawasan Penyelengaraan Pemerintahan	Dalam/luar Kab. Tangerang	Terselenggaranya Pengawasan Kinerja Pemerintahan	4 kali	
4.	Peningkatan Kapasitas DPRD	Dalam/luar Kab. Tangerang	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas DPRD	6 kali	
5.	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Kab. Tangerang	Terlaksananya Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	165 org	
6.	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Dalam/luar Kab. Tangerang	Terlaksananya Penyusunan Kode Etik DPRD	1 dok	
7.	Pembahasan Kerja Sama Daerah	Kab. Tangerang	Terlaksananya Komunikasi dan Publikasi	24 dok	
8.	Fasilitasi Tugas DPRD	Dalam/luar Kab. Tangerang	Terlakananya Fasilitasi Tugas DPRD	119 dok	

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berpedoman pada Peraturan Bupati Tangerang Nomor 5 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang, secara organisatoris dan manajerial Sekretariat DPRD merupakan fasilitator yang menopang seluruh tugas, fungsi dan kewenangan DPRD dalam melaksankan kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Tahunan DPRD baik bersifat rutin maupun pelaksanaan program dan kegiatan yang telah rencanakan, diantaranya memfasilitasi tiga fungsi utama DPRD yaitu :

1. Peran Setwan pada fungsi Pembentukan Perda, pada fasilitasi :
   - Penyusunan Propemperda;
   - Pembahasan Rancangan Perda;
   - Usul Rancangan Perda inisiatif DPRD;
   - Menyelenggarakan Kajian Perundang-undangan;
   - Memfasilitasi penyusunan Naskah Akademik dan Draf Rancangan Perda; dan
   - Evaluasi terhadap penyiapan penyusunan rancangan perda.
2. Peran Setwan pada Fungsi Anggaran, pada fasilitasi :
   - Pembahasan KUA PPAS dan Perubahan KUA PPAS;
   - Pembahasan rancangan Perda tentang APBD dan Perubahan APBD;
   - Pembahasan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan
   - Pembahasan laporan semester pertama dan prognosis 6 (enam) bulan berikutnya.
3. Peran Setwan pada Fungsi Pengawasan, pada fasilitasi :
   - Pembahasan Laporan Keuangan Pertanggungjawaban Bupati;
   - Pembahasan tindak lanjut hasil Pemeriksaan BPK;
   - Pelaksanaan fasilitasi, verifikasi, dan koordinasi aspirasi masyarakat;
   - Koordinasi pelaksanaan penegakan kode etik DPRD;
   - Koordinasi pelaksanaan pengawasan pelaksanaan kebijakan;
   - Koordinasi pelaksanaan penyusunan pokok pikiran DPRD; dan

     Pembahasan persetujuan kerja sama daerah.

Selain ketiga fungsi tersebut Sekretariat DPRD mempunyai peran lain yaitu:

1. Peran terhadap Alat Kelengkapan Dewan.
2. Peningkatan SDM.
3. Peningkatan Sarana dan Prasarana.
4. Pembinaan Administrasi Pengelolaan Kesekretariatan.
5. Menjadi Publik Relation Kinerja DPRD.
6. Peningkatan Koordinasi Dengan SKPD atau Lembaga Terkait Lainnya.

Mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan

Keuangan Daerah. Pada Tahun Anggaran 2025 Sekretariat DPRD menetapkan Rencana Kerja yang yang ditaungkan pada 2 progam yaitu :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas 9 kegiatan dengan 32 sub kegiatan dan
b. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD terdiri atas 8 kegiatan dengan 27 sub kegiatan.

Pada anggaran perubahan saat ini telah teralokasikan anggaran sebesar Rp. 119.494.104.004,- dan telah terinci per sub kegiatan dalam SIPD yang merupakan anggaran efisiensi setelah mendapat anggaran tambahan sebesar Rp. 2.806.109.491,-. Alokasi anggaran ini tidak mencukupi dalam satu tahun anggaran dan kemungkinan akan bertambah dalam pembahasan KUA PPAS perubahan setelah adanya kesepakatan Tim APD dengan DPRD.

Tabel 4.1

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERUBAHAN
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2025

No.	Program/Kegiatan	Jumlah Kegiatan	Anggaran (Rp)	Ket
I	**SEKRETARIAT DPRD**	17	119.494.104.004	
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	9	83.619.268.204	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		62.449.000	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		12.603.102.433,	
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		776.465.250	
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah		8.592.789.172	
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		1.406.234.000	
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		971.091.600	
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		2.429.793.600	
8	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		55.468.999.149	
9	Layanan Administrasi DPRD		1.308.344.000	

No.	Program/Kegiatan	Jumlah Kegiatan	Anggaran (Rp)	Ket
2	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	8	35.874.835.800	
1	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD		1.397.865.800	
2	Pembahasan Kebijakan Anggaran		739.955.600	
3	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan		1.309.802.320	
4	Peningkatan Kapasitas DPRD		5.554.707.480	
5	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		8.177.581.000	
6	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD		-	
7	Pembahasan Kerja Sama Daerah		69.611.720	
8	Fasilitasi Tugas DPRD		18.625.311.880	

Tabel 3.1.
Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan SKPD Tahun 2025 Dan Prakiraan Maju Tahun 2026

Kode				Unsur Pendukung Urusan Pemerintah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatang Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan**		100%	**83.619.268.204**	APBD		100%	**90.560.398.306**
					Persentase pemenuhan administrasi kepegawaiaan dan umum		100%				100%	
					Prosentase pemenuhan administrasi keuangan dan program		100%				100%	
			1	**Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		8 dokumen	**62.449.000**	APBD	8 dokumen	100%	**88.288.500**
					Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan		100%					
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Tangerang	3 dokumen	19.290.000	APBD		3 dokumen	32.492.500
				Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD"	Kabupaten Tangerang	1 dokumen	8.022.000	APBD		1 dokumen	10.742.000
				Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Kabupaten Tangerang	1 Dokumen	8.734.000	APBD		1 Dokumen	10.742.000

					Dokumen Perubahan RKA-SKPD"							
				Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD"	Kabupaten Tangerang	1 dokumen	7.666.000,	APBD		1 dokumen	10.742.000
				Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kabupaten Tangerang	1 dokumen	9.850.000	APBD		1 dokumen	12.306.500
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Kabupaten Tangerang	1 dokumen	8.887.000	APBD		1 dokumen	11.263.500
			2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah laporan keuangan		1 lap	**12.603.102.433**	APBD		1 lap	**12.586.947.890**
					Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100				100%	
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Tangerang	60 org	12.550.538.433	APBD		60 org	12.509.982.790
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kabupaten Tangerang	1 lap	13.540.000	APBD		1 lap	17.937.500
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan/Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		8 lap	39.024.000	APBD		8 lap	59.027.600
			3	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah pegawai yang difasilitasi**		135 orang	**807.354.050**	APBD		135 orang	**1.473.705.600**
					Prosentase aparatur yang meningkat kapasitasnya		100				100%	
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kabupaten Tangerang	5 pkt	216.426.000	APBD		5 pkt	524.397.100

				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kabupaten Tangerang	135 orang	560.039.250	APBD		135 orang	949.308.500
			4	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah**		7 paket	**8.592.789.172**	APBD		7 paket	**15.052.998.690**
					Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%					100%	
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kabupaten Tangerang	2 paket	179.714.000	APBD		2 paket	213.846.500
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kabupaten Tangerang	7 paket	1.253.716.700	APBD		7 paket	2.033.734.600
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kabupaten Tangerang	7 paket	432.094.800	APBD		7 paket	623.820.530
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kabupaten Tangerang	2 paket	375.821.992			2 paket	552.474.400
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kabupaten Tangerang	2 paket	323.983.200	APBD		2 paket	253.403.500
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kabupaten Tangerang	16 dok	259.753.630	APBD		16 dok	507.231.800
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu"	Kabupaten Tangerang	108 lap	510.813.000	APBD		108 lap	510.600.000
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Tangerang	856 laporan	5.256.891.850	APBD		856 laporan	10.357.887.360
			5	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah barang milik daerah**		132 unit	**1.406.234.000,**	APBD		132 unit	**2.761.786.700**
					Prosentase pemenuhan barang milik daerah		100%				100%	
				Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kabupaten Tangerang	132 unit	1.406.234.000	APBD		132 unit	2.340.763.700
			6	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tersedianya Jasa Penunjang**		12 lap	**971.091.600**	APBD		12 lap	**826.599.000**

					Persentase pemenuhan Jasa Penunjang		100%				100%	
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kabupaten Tangerang	12 lap	0	APBD		12 laporan	60.000.000
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kabupaten Tangerang	12 lap	971.091.600	APBD		12 laporan	766.599.000
			7	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		2 unit	**2.429.793.600**	APBD		2 unit	**2.762.158.576**
					Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah		100%				100%	
				Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kabupaten Tangerang	23 unit	546.411.600	APBD		23 unit	788.554.576
				Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kabupaten Tangerang	19 unit	87.800.000	APBD		19 unit	88.000.000
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kabupaten Tangerang	45 item	215.000.000	APBD		45 item	28.020.000
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kabupaten Tangerang	2 unit	1.321.582.000	APBD		2 unit	1.399.648.000
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kabupaten Tangerang	25 unit	259.000.000	APBD		25 unit	457.936.000
			8	**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	**Tersedianya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**		55 orang	**55.468.999.149**	APBD		55 orang	**55.468.999.149**
					Persentase Pemenuhan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		100				100	
				Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	Kabupaten Tangerang	55 orang	53.881.792.249	APBD		55 orang	53.881.792.249

				Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Kabupaten Tangerang	5 pkt	1.392.332.700	APBD		5 pkt	1.392.332.700
				Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	Kabupaten Tangerang	55 orang	194.874.200,	APBD		55 orang	194.880.950
			9	**Layanan Administrasi DPRD**	**Tersedianya Fasilitasi Rapat dan Koordinasi DPRD**		58 lap	**1.308.344.000**	APBD		58 lap	**1.855.655.200**
					Persentase pemenuhan rapat dan koordinasi DPRD		100%				100%	
				Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Kabupaten Tangerang	58 lap	1.308.344.000	APBD		58 lap	1.855.655.200
				Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	**Prosentase pemenuhan dukungan pelaksanaan fasilitasi penganggaran dan pengawasan**		100%	**35.874.835.800**	APBD		100%	**72.497.856.144**
					Prosentase pemenuhan dukungan pelaksanaan persidangan dan perundang-undangan							
			10	**Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**	Terlaksananya Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD Persentase Pemenuhan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Dalam/luar Kabupaten Tangerang	8 dok	**2.367.608.000**	APBD		12 dok	**3.487.462.500**
				Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Dalam/luar Kabupaten Tangerang	5 dok	256.353.400	APBD		5 dok	466.194.000
				Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Dalam/luar Kabupaten Tangerang	8 dok	889.512.400	APBD		12 dok	2.427.371.500
				Fasilitasi Penyusunan Pejelasan/ Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	Dalam/luar Kabupaten Tangerang	3 dok	252.000.000	APBD		3 dok	504.000.000
				Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	Dalam/luar Kabupaten Tangerang	1 dok	-	APBD		1 dok	89.897.000

			11	**Pembahasan Kebijakan Anggaran**	**Terlaksananya Pembahasan Kebijakan Anggaran**		5 dok	**739.955.600**	APBD		5 dok	**1.375.064.000**
					Persentase Pemenuhan Pembahasan Kebijakan Anggaran	100%					100%	
				Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	Dalam/luar Kabupaten Tangerang	1 dok	137.194.600	APBD		1 dok	237.885.000
				Pembahasan Perubahan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Dalam/luar Kabupaten Tangerang	1 dok	137.194.600	APBD		1 dok	237.885.000
				Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Dalam/luar Kabupaten Tangerang	1 dok	164.007.400	APBD		1 dok	237.885.000
				Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	Dalam/luar Kabupaten Tangerang	1 dok	164.364.400	APBD		1 dok	237.885.000
				Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	Dalam/luar Kabupaten Tangerang	0 dok	-	APBD		0 dok	185.739.000
				Pembahasan Pertanggung Jawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggung jawaban APBD	Dalam/luar Kabupaten Tangerang	1 dok	137.194.600	APBD		1 dok	237.785.000
			12	**Pengawasan Penyelengaraan Pemerintahan**	**Terselenggaranya Pengawasan Kinerja Pemerintahan**		16 lap	**1.309.802.320**	APBD		16 lap	**2.391.798.324**
					Persentase pemenuhan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan		100				100%	
				Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Dalam/luar Kabupaten Tangerang	4 lap	275.945.680	APBD		4 laporan	432.066.036
				Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Dalam/luar Kabupaten Tangerang	4 lap	275.945.680	APBD		4 laporan	432.066.036
				Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Dalam/luar Kabupaten Tangerang	4 lap	275.945.680	APBD		4 laporan	432.066.036
				Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Dalam/luar Kabupaten Tangerang	4 lap	275.945.680	APBD		4 laporan	432.066.036

				Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Dalam/luar Kabupaten Tangerang	0 dok	-	APBD		0 dokumen	288.237.380
				Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Dalam/luar Kabupaten Tangerang	1 dok	206.019.600	APBD		1 dokumen	375.296.800
			13	**Peningkatan Kapasitas DPRD**	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas DPRD		1 dok	**5.554.707.480**	APBD		1 dok	**10.436.903.420**
					Persentase pemenuhan Peningkatan Kapasitas DPRD	100					100	
				Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Dalam/luar Kabupaten Tangerang	6 dok	2.318.649.180	APBD		6 dok	2.549.710.380
				Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Dalam/luar Kabupaten Tangerang	4 orang	323.869.000	APBD		4 orang	164.129.000
				Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Dalam/luar Kabupaten Tangerang	8 orang	773.328.800	APBD		8 orang	878.438.400
				Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Dalam/luar Kabupaten Tangerang	144 dok	652.052.00	APBD		144 dok	5.109.746.000
				Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	Dalam/luar Kabupaten Tangerang	1 dok	50.767.400	APBD		1 dok	112.474.000
				Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Dalam/luar Kabupaten Tangerang	430 dok	1.622.195.620	APBD		430 dok	1.622.405.640
			14	**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	**Terlaksananya Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**		165 dok	**8.177.581.000**	APBD		165 dok	**9.080.516.500**
					Persentase Pelaksanaan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	100					100	
				Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD"	Kabupaten Tangerang	55 org	28.954.00	APBD		55 org	193.995.000
				Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	Kabupaten Tangerang	110 dok	12.092.000	APBD		110 dok	18.928.500

				Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Kabupaten Tangerang	165 dok	8.036.535.000	APBD		165 dok	8.867.593.000
			15	**Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**	**Terlaksananya Penyusunan Kode Etik DPRD**		1 dok	-	APBD		1 dok	**89.897.000**
					Persentase Penyusunan Kode Etik DPRD	100					100	
				Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	Dalam/luar Kabupaten Tangerang	1 dok	-	APBD		1 dokumen	89.897.000
			16	**Pembahasan Kerja Sama Daerah**	**Terlaksananya Komunikasi dan Publikasi**			**69.611.720**	APBD		100%	**128.104.000**
					Persentase pemenuhan komunikasi dan publikasi		100%					
				Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	Kabupaten Tangerang	24 dok	69.611.720	APBD		24 dok	128.104.000
			17	**Fasilitasi Tugas DPRD**	**Terlaksananya fasilitasi tugas DPRD**		1 lap	**18.625.311.880**	APBD		1 lap	**45.508.110.400**
					Prosentase pemenuhan fasilitasi tugas DPRD	100					100	
				Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Dalam/luar Kabupaten Tangerang	119 dok	18.391.686.280	APBD		119 dok	45.380.493.600
				Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	Dalam/luar Kabupaten Tangerang	1 lap	99.164.000	APBD		1 lap	60.512.800
				Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Kabupaten Tangerang	12 dok	38.502.400	APBD		12 dok	67.104.000
				Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Dalam/luar Kabupaten Tangerang	2 dok	95.959.200	APBD		2 dok	215.867.000

Dapat kami sampaikan bahwa adanya perbendaan antara dokumen Renstra 2024 – 2026 dengan Renja 2025 perubahan pada Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan tiga indikator didalamnya seharusnya hanya menggunakan dua indikator yaitu Persentase pemenuhan administrasi kepegawaiaan dan umum diperuntukan pada Bagian Umum dan Prosentase pemenuhan administrasi keuangan dan program yang diperuntukan pada Bagian Program dan Keuangan sedangkan indikator Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan 8 dokumen merupakan indikator yang digunakan untuk kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Dengan demikian terdapat kejelasan serta tidak terjadi salah penafsiran dalam perbaikan renja 2025 perubahan, mudah-mudahan dalam penyusunan rencana kerja selanjutnya kami dapat melakukan penyempurnaan dan meminimalis kesalahan dalam penyusunan.

BAB IV
PENUTUP

Rencana kerja perubahan Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2025 merupakan tahun kedua dari pelaksanaan Rencana Strategis Tahun 2024 - 2026, disusun secara sinergi dan berkesinambungan dengan mempertimbangkan tugas pokok, fungsi dan tata kerja organisasi dalam rangka mewujudkan Tujuan organisasi. Rencana kerja perubahan ini merupakan pedoman bagi seluruh jajaran organisasi yang berada dilingkup Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang dalam melaksanakan program dan kegiatan selama 1 tahun yang akan datang.

Pelaksanaan kegiatan dan pencapaian kinerja yang diharapkan oleh setiap bagian pada organisasi yang bertanggung jawab secara langsung terhadap kegiatan tersebut, berkewajiban untuk menuangkan ke dalam bentuk dokumen teknis operasional kegiatan, yaitu Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja (RKA) maupun Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja (DPA) yang tepat, akurat dan terencana dengan baik. Selain itu, pada saat kegiatan akan dilaksanakan, setiap pengelola kegiatan maupun penanggung jawab kegiatan perlu melakukan pengendalian secara periodik dilaksanakan melalui monitoring dan evaluasi baik terhadap rencana kegiatan dan rencana anggaran sehingga program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat terkontrol dari segi waktu pelaksanaan maupun dari segi anggaran. Hal ini perlu dilakukan mengingat kegiatan monitoring merupakan suatu proses manajemen yang tidak terpisahkan dengan fungsi lainnya seperti perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan sedangkan kegiatan evaluasi juga sangat bermanfaat sebagai umpan balik bagi perencanaan yang akan datang.Pengukuran pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD dilakukan terhadap fasilitasi program, kegiatan dan sub kegiatan yang langsung mendukung tugas dan fungsi DPRD dan program penunjang pemerintah daerah kabupaten/kota. Pengukuran tingkat capaian sasaran program dan kegiatan tersebut dilakukan secara bertahap dari indikator kinerja, target dan capaian target. Bagi Sekretariat DPRD, dokumen rencana kerja perubahan ini menjadi pedoman seluruh pegawai guna mencapai tujuan yang telah disepakati. Keberhasilan pencapaian tujuan tersebut dapat diperoleh melalui dukungan dan kemauan :

1. Komitmen kepemimpinan perangkat daerah;
2. Konsistensi;
3. Kerja keras dan kesungguhan seluruh pegawai Sekretariat DPRD;
4. Partisipasi antar bagian dan sub bagian;
5. Pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan sesuai rencana yang telah ditetapkan;
6. Kedisiplinan penyusunan dan pelaksanaan anggaran;
7. Monitoring dan evaluasi secara berjenjang terhadap pelaksanaan kinerja.

Adapun kaidah-kaidah pelaksanaan adalah sebagai berikut :

1. Seluruh Bagian, Sub Bagian dan pelaksana berkewajiban melaksanakan atau mendukung program, kegiatan dan sub kegiatan

dalam RKPD Tahun 2025 dengan berpartisipasi aktif. sebaik-baiknya;
2. Seluruh Bagian, Sub Bagian menjamin konsistensi dokumen perencanaan;
3. Setiap Bagian dan Sub Bagian berkewajiban memantau dan mengevaluasi pelaksanaan dokumen perencanaan;
4. Untuk menjaga efektivitas pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan setiap bagian, sub bagian wajib melakukan pemantauan kegiatan dan sub kegiatan, melakukan Tindakan koreksi yang diperlukan serta melaporkan secara berkala kepada kepala perangkat daerah;
5. Apabila terjadi perubahan situasi dari keadaan normal pada saat RKPD ditetapkan, yang bersifat memperlambat atau mempercepat pencapaian tujuan maka perubahan situasi tersebut tidak untuk mengubah tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Implikasinya adalah memungkinkan adanya pergeseran target dan anggaran, tetapi masih dalam kerangka pencapaian tujuan semula.

Rencana kerja perubahan Sekretariat DPRD Tahun 2025 digunakan sebagai acuan dalam penyusunan anggaran berpedoman pada RKPD Tahun 2025 serta memperhatikan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Dengan demikian rencana tindaklanjut yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan rencana kerja sebaik-baiknya sesuai dengan tugas dan fungsi masing.
2. Merancang dan menyusun anggaran secara transparan, efektif, efisien, cermat, teliti dan terukur.
3. Melaksanakan seluruh program, kegiatan dan kegiatan sesuai rencana yang telah ditetapkan.
4. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi antar bagian dan sub bagian secara intensif dalam rencana pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan untuk memperoleh tujuan kinerja yang lebih baik.
5. Dalam rangka efektifitas pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan perlu adanya pengendalian dan evaluasi secara berkala dan berjenjang terhadap implementasi rencana kerja ini.

3. Inspektorat

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (RENJA) merupakan acuan setiap Perangkat Daerah (PD) dalam mengoperasionalkan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi jangka menengah daerah. Dengan rencana kerja yang terukur dan didukung oleh pendanaan, maka menjadi suatu instrumen dan indikator yang digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah.

Penyusunan RENJA berpedoman pada Renstra Inspektorat Kabupaten Tangerang dan mengacu pada rencana kerja pemerintah daerah (RKPD). Penyusunan RENJA bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD. Rencana Kerja Inspektorat merupakan bagian yang utuh dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat. Keduanya merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah dan peraturan menteri dalam negeri nomor 28 tahun 2009 tentang perubahan atas peraturan menteri dalam negeri nomor 23 tahun 2007 tentang pedoman tata cara pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dengan demikian program dan kegiatan pembangunan yang ada pada dokumen perencanaan diatur secara rinci dalam rencana kerja (RENJA).

Rencana Kerja Perubahan pada Inspektorat Kabupaten Tangerang Tahun 2025 merupakan tahun pertama Rencana Strategis Tahun 2025-2026 yang memuat sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan Inspektorat tahun 2025.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum yang melatar belakangi penyusunan renja perubahan Inspektorat Kabupaten Tangerang tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004, Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2006 tentang tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 41 tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan tata cara penyusunan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah;

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat Dilingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09 Tahun 2009 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi Dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09 Tahun 2009 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi Dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang;
17. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Tangerang;
18. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025 – 2026;
19. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 17 Tahun 2025 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Inspektorat Kabupaten Tangerang Tahun 2025, disusun dengan maksud untuk menunjukan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dari berbagai kegiatan, serta mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya pembangunan daerah.

Rencana Kerja disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang ada di Inspektorat, penyusunan kebijakan anggaran, program dan kegiatan Tahun 2025 serta sebagai bahan evaluasi kinerja Inspektorat Kabupaten Tangerang.

1.3.2. Tujuan

Penyusunan Renja Perubahan Inspektorat Kabupaten Tangerang Tahun 2025:

1. Menyediakan dokumen rumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan serta indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif, dan lokasi kegiatan dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan Inspektorat tahun 2025;
2. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2025 dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Inspektorat Kabupaten Tangerang secara sistematis dan terorganisir;
3. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; dan
4. Sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA-P) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Inspektorat Kabupaten Tangerang Tahun 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

RENJA Perubahan Inspektorat Kabupaten Tangerang tahun 2024 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja, proses penyusunan Renja, keterkaitan antara Renja dengan dokumen RKPD, Renstra, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan Rancangan APBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja Perubahan Inspektorat Kabupaten Tangerang Tahun 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI RENJA INSPEKTORAT KABUPATEN TANGERANG SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

Menggambarkan kajian/reviu terhadap Hasil Evaluasi Renja Inspektorat Kabupaten Tangerang tahun berkenaan.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat sampai dengan triwulan II tahun 2025 dan Capaian Renstra Inspektorat

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Tangerang

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat

2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN INSPEKTORAT KABUPATEN TANGERANG

BAB IV PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA INSPEKTORAT KABUPATEN TANGERANG SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat sampai dengan triwulan I tahun 2025 dan Capaian Renstra Inspektorat

Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan. Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Kinerja sendiri merupakan keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

Pengukuran Laporan Kinerja dilakukan dengan menggunakan konsep *Value For Money,* Penggunaan konsep dimaksud memerlukan indikator-indikator sebagai berikut:

a. Indikator Masukan (input), untuk mengukur jumlah sumberdaya seperti anggaran (dana), SDM, peralatan, material, dan masukan lainnya untuk melakukan suatu kegiatan.
   Dengan meninjau distribusi sumberdaya dapat dianalisis apakah alokasi sumberdaya yang dimiliki telah sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan.

b. Indikator Keluaran (Output), merupakan indikator yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan, baik berupa fisik maupun berupa non fisik.
c. lndikator Hasil (Outcome), merupakan indikator yang menunjukkan telah dicapainya maksud dan tujuan dari kegiatan - kegiatan yang telah selesai dilaksanakan atau indikator yang mencerminan berfungsinya keluaran pada jangka menengah.

Sedangkan Laporan Keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban keuangan yang berbentuk laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat, berdasarkan realisasi target kinerja keluaran dari kegiatan yang dilaksanakan serta capaian dari target program/kegiatan Inspektorat. Pada bab ini memuat kajian (reviu) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat sampai dengan triwulan II Tahun 2025, serta pencapaian target Renstra Inspektorat berdasarkan realisasi program kegiatan pelaksanaan Renja Tahun 2023.

Adapun evaluasi hasil pelaksanaan pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan II Tahun 2025 dan Capaian Renstra Inspektorat tersaji pada Tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2. 1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 Inspektorat Kabupaten Tangerang (Tabel T-C. 29)

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD 2024 - 2026) Tahun 2025	REALISASI TARGET KINERJA S/D TAHUN 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN LALU			TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
						TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023	REALISASI TARGET KINERJA S/D TAHUN 2023	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI TARGET KINERJA S/D TAHUN 2024	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)
6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**										
6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**										
6.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan**		**100%**	**93,20%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00**	**293,20**	**73.3%**
6.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Dokumen**	**5**	**100%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00**	**300,00**	**75,00%**
6.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	4	3	3	100,00%	13,00	20,00	**5%**
6.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	-	2	2	100,00%	1,00	3,00	**300,00%**
6.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	2	-	4	4	100,00%	1,00	5,00	**250,00%**

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD 2024 - 2026) Tahun 2025	REALISASI TARGET KINERJA S/D TAHUN 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN LALU			TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
						TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023	REALISASI TARGET KINERJA S/D TAHUN 2023	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI TARGET KINERJA S/D TAHUN 2024	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)
6.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	rsh	1	-	2	2	100,00%	1,00	3,00	**300,00%**
6.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	2	-	4	4	100,00%	1,00	5,00	**250,00%**
6.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	1	1	1	100,00%	1,00	3,00	**300,00%**
6.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	12	8	1	1	100,00%	8,00	17,00	**141,67%**
6.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Keuangan**	**Dokumen**	**2**	**100%**	**2**	**2**	**100,00%**	**2,00**	**2,00**	**100,00%**
6.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	111	87	82	86	104,88%	84,00	257,00	**285,56%**

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD 2024 - 2026) Tahun 2025	REALISASI TARGET KINERJA S/D TAHUN 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN LALU			TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
						TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023	REALISASI TARGET KINERJA S/D TAHUN 2023	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI TARGET KINERJA S/D TAHUN 2024	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)
6.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1	1	1	100,00%	1,00	3,00	**300,00%**
6.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Laporan	2	-	2	2	100,00%	2,00	4,00	**200,00%**
6.01.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Barang Milik Daerah**	**Dokumen**	**1**	**0**	**1**	**1**	**100,00%**	**1,00**	**1,00**	**100,00%**
6.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	2	-	2	2	100,00%	2,00	4,00	**200,00%**
6.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	2	-	1	1	100,00%	2,00	3,00	**150,00%**
6.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	-	2	2	100,00%	1,00	3,00	**300,00%**
6.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Pegawai Difasilitasi**	**Orang**	**141**	**77,78%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**136,00**	**125,00**	**104,17%**

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD 2024 - 2026) Tahun 2025	REALISASI TARGET KINERJA S/D TAHUN 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN LALU			TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
						TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023	REALISASI TARGET KINERJA S/D TAHUN 2023	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI TARGET KINERJA S/D TAHUN 2024	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)
6.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	3	-	0	0	-	5,00	5,00	**166,67%**
6.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	141	175	83	83	100,00%	136,00	394,00	**279,43%**
6.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jenis**	**7**	**98,94%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**8,00**	**8,00**	**100,00%**
6.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5	6	6	6	100,00%	6,00	18,00	**360,00%**
6.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	13	12	5	5	100,00%	5,00	22,00	**110,00%**
6.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	50	20	14	14	100,00%	15,00	49,00	**98,00%**
6.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	30	67	32	32	100,00%	45,00	144,00	**480,00%**
6.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	20	5	8	8	100,00%	8,00	21,00	**105,00%**
6.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	0	1	1	100,00%	20,00	21,00	**175,00%**

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD 2024 - 2026) Tahun 2025	REALISASI TARGET KINERJA S/D TAHUN 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN LALU			TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
						TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023	REALISASI TARGET KINERJA S/D TAHUN 2023	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI TARGET KINERJA S/D TAHUN 2024	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)
6.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4	4519	4	4	100,00%	4,00	4527,00	**113175,00%**
6.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	280	4	4	100,00%	7,00	291,00	**7275,00%**
6.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah**	**Unit**	**8**	**-**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**20,00**	**20,00**	**250,00%**
6.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	4	-	6	6	100,00%	2,00	8,00	**200,00%**
6.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	7	-	3	3	100,00%	15,00	18,00	**100,00%**
6.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jenis**	**3**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**3,00**	**3,00**	**100,00%**
6.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	1	12	12	100,00%	12,00	25,00	**208,33%**
6.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	11	12	12	100,00%	12,00	35,00	**291,67%**
6.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah jenis kegiatan pemeliharaan barang milik daerah**	**Jenis**	**30**	**86,49%**	**100,00%**	**92,31%**	**92,31%**	**89,00**	**89,00**	**2225,00%**

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD 2024 - 2026) Tahun 2025	REALISASI TARGET KINERJA S/D TAHUN 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN LALU			TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
						TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023	REALISASI TARGET KINERJA S/D TAHUN 2023	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI TARGET KINERJA S/D TAHUN 2024	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)
6.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	7	19	6	6	100,00%	7,00	32,00	**457,14%**
6.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	30	20	20	18	90,00%	22,00	60,00	**200,00%**
6.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	5	-	5	5	-	5,00	10,00	**200,00%**
6.01.01.2.09.06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	60	11	50	50	100,00%	50,00	111,00	**185,00%**
6.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	5	5	100,00%	2,00	8,00	**800,00%**
6.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	-	2	2	-	2,00	4,00	**400,00%**
06.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**Prosentase Perangkat Daerah yang melaksanakan 3E (Efektif, Efisien, Ekonomis)**	**Persen**	**66,07%**	**92,68%**	**95,00%**	**100,00%**	**105,26%**	**33,16**	**33,16**	**5018,92%**

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD 2024 - 2026) Tahun 2025	REALISASI TARGET KINERJA S/D TAHUN 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN LALU			TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
						TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023	REALISASI TARGET KINERJA S/D TAHUN 2023	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI TARGET KINERJA S/D TAHUN 2024	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)
6.01.02.1.01	**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	**Jumlah Laporan hasil pemeriksaan**	**Laporan**	**2244**	**92,68%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**2109,00**	**2109,00**	**93,98%**
6.01.02.1.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan	1	279	6	6	100,00%	3,00	288,00	**2618,18%**
6.01.02.1.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan	122	-	18	18	100,00%	1,00	19,00	**16,52%**
6.01.02.1.01.03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Laporan	257	156	98	98	100,00%	1240,00	1494,00	**392,13%**
6.01.02.1.01.04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Laporan	213	402	2058	2058	100,00%	163,00	2623,00	**766,96%**
6.01.02.1.01.05	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Laporan	248	-	46	46	100,00%	738,00	784,00	**106,23%**
6.01.02.1.01.06	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Kesepakatan	2	-	35	30	85,71%	2,00	32,00	**1066,67%**
6.01.02.1.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Dokumen	1154	797	463	463	100,00%	1200,00	2460,00	**213,36%**
6.01.02.1.02	**Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**	**Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**	**Laporan**	**74**	**-**	**55**	**55**	**100,00%**	**72,00**	**72,00**	**3,91%**
6.01.02.1.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara / Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Laporan	4	-	30	30	100,00%	45,00	75,00	**88,24%**

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD 2024 - 2026) Tahun 2025	REALISASI TARGET KINERJA S/D TAHUN 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN LALU			TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
						TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023	REALISASI TARGET KINERJA S/D TAHUN 2023	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI TARGET KINERJA S/D TAHUN 2024	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)
6.01.02.1.02.02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Laporan	685	-	25	25	100,00%	27,00	52,00	**2,96%**
06.01.03	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	**Prosentase Perangkat Daerah yang Memenuhi Kriteria Menuju Zona Integritas**	**Persen**	**100%**	**3,3120**	**3,1808**	**3,0160**	**94,82%**	**100,00**	**100,00**	**10000,00%**
06.01.03.1.01	**Perumusan Kebijakan Teknis DI Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**	**Jumlah Rumusan Kebijakan yang dihasilkan**	**Dokumen**	**15**	**-**	**13**	**13**	**100,00%**	**13,00**	**13,00**	**86,67%**
06.01.03.1.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis Di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Rekomendasi	8	-	13	13	100,00%	13,00	26,00	**200,00%**
06.01.03.1.02	**Pendampingan dan Asistensi**	**Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi**	**Perangkat Daerah**	**63**	**3**	**63**	**63**	**100,00%**	**197,00**	**197,00**	**312,70%**
06.01.03.2.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Perangkat Daerah	60	408	83	83	100,00%	100,00	591,00	**244,21%**
06.01.03.2.02.02	Pendampingan , Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	4	-	63	63	100,00%	10,00	73,00	**730,00%**

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD 2024 - 2026) Tahun 2025	REALISASI TARGET KINERJA S/D TAHUN 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN LALU			TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
						TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023	REALISASI TARGET KINERJA S/D TAHUN 2023	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI TARGET KINERJA S/D TAHUN 2024	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)
06.01.03.2.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Serta Verifikasi Pencegehan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kegiatan	13	-	30	17	56,67%	4,00	21,00	**161,064%**
06.01.03.2.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Perangkat Daerah	24	-	63	63	100,00%	83,00	146,00	**110,61%**

Faktor pendorong tercapainya target dan keberhasilan program-program di Inspektorat Kabupaten Tangerang antara lain:

1. Penataan kegiatan dengan melibatkan berbagai unsur baik auditor maupun pihak manajemen dan pengupayaan rapat koordinasi disela-sela kesibukan mandatory menjadikan kegiatan audit dapat terlaksana;
2. Terdapat penambahan pegawai CPNS sehingga selanjutnya akan dilibatkan untuk pelaksanaan audit;
3. Adanya koordinasi yang intens antara Inspektorat dengan OPD pengampu masing-masing temuan;
4. Adanya monitoring tindak lanjut per triwulan yang diselenggarakan Inspektorat;
5. Adanya desk pembahasan temuan dengan BPK dan koordinasi diluar forum resmi desk BPK setiap kali ada bukti dukung tindak lanjut baru di OPD;
6. Bertambahnya kompetensi auditor memperkuat peran layanan APIP'
7. Komitmen APIP terhadap kepatuhan standar dan kode etik APIP.

Sedangkan faktor penghambat tidak tercapainya target program-program di Inspektorat Kabupaten Tangerang antara lain:

1. Adanya kegiatan mandatory menyebabkan kegiatan menjadi terhambat pelaksanaanya;
2. Masih terdapat temuan-temuan di tahun sebelumnya yang belum terselesaikan di OPD pengampu, sedangkan pegawai yang mengampu mengalami mutasi, hal ini menyebabkan waktu yang seharusnya digunakan untuk melaksanakan kegiatan di tahun berjalan menjadi terhambat karena harus mengawal Kembali kegiatan/temuan-temuan di tahun sebelumnya.

Adapun solusi yang dilakukan adalah melakukan evaluasi dan telah dilakukan komunikasi oleh Inspektorat secara intensif, selain itu mengadakan koordinasi dan monitoring ke OPD terkait untuk melakukan tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Pada tahun 2024 terdapat dua program yaitu Program Penyelenggaraan Pengawasan dan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi telah terealisasi sesuai target dan bahkan melampaui target yang diusulkan. Hal ini tidak terlepas dari beberapa hal, yaitu faktor pendorong dikarenakan adanya koordinasi intensif antara inspektorat dengan auditan dan komitmen yang baik di antara keduanya. Adapun faktor penghambat adalah hasil rekomendasi terkait kebijakan di OPD membutuhkan waktu yang lama. Sehingga untuk mengatasi faktor penghambat tersebut adalah dilakukan komunikasi oleh Inspektorat secara intensif, mengadakan koordinasi dan monitoring ke OPD terkait tindak lanjutnya.

Pada tahun 2025 perubahan, Inspektorat Kabupaten Tangerang masih akan mengusulkan program seperti yang telah dilakukan pada tahun 2025 murni, yaitu dengan 2 Program antara lain: PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN dan PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI.

Adapun evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja s.d Triwulan II Tahun Anggaran 2025 pada Tabel 2.2 sebagai berikut:

Tabel 2. 2
Laporan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2025
Periode 01 Januari 2024 – 31 Maret 2025

NO	KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SATUAN INDIKATOR	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	% KINERJA	TARGET ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	SELISIH ANGGARAN	% KETERCAPAIAN ANGGARAN	% Anggaran	% Fisik
	6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**											
	6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**											
A	**6.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan**	**Persen**	**100.00%**	**31.65%**	**31.65%**	**41,675,503,317**	**9,468,539,396**	**32,206,963,921**	**22.72%**	**22.72%**	**25.00%**
1	**6.01.01.2.01**	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Dokumen**	**5**	**3**	**60%**	**401,758,500**	**176,385,000**	**225,373,500**	**43.90%**	**43.90%**	**25.00%**
1)	6.01.01.2.01.0001	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	2	40%	202,215,500	72,060,000	130,155,500	35.64%	35.64%	25.00%
2)	6.01.01.2.01.0002	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	0	0%	8,030,000	-	8,030,000	0.00%	0.00%	0.00%
3)	6.01.01.2.01.0003	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	2	1	50%	24,455,000	12,045,000	12,410,000	49.25%	49.25%	25.00%
4)	6.01.01.2.01.0004	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	0	0%	11,252,000	-	11,252,000	0.00%	0.00%	0.00%

NO	KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SATUAN INDIKATOR	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	% KINERJA	TARGET ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	SELISIH ANGGARAN	% KETERCAPAIAN ANGGARAN	% Anggaran	% Fisik
5)	6.01.01.2.01.0005	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	2	1	50%	34,837,000	17,057,000	17,780,000	48.96%	48.96%	25.00%
6)	6.01.01.2.01.0006	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	1	100%	75,397,000	75,223,000	174,000	99.77%	99.77%	25.00%
7)	6.01.01.2.01.0007	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	12	3	25%	45,572,000	-	45,572,000	0.00%	0.00%	0.00%
2	**6.01.01.2.02**	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Keuangan**	**Dokumen**	**2**	**2**	**100%**	**30,535,527,420**	**8,076,488,516**	**22,459,038,904**	**26.45%**	**26.45%**	**25.00%**
8)	6.01.01.2.02.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	111	111	100%	30,517,677,420	8,076,488,516	22,441,188,904	26.46%	26.46%	25.00%
9)	6.01.01.2.02.0005	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	0	0%	10,564,000	-	10,564,000	0.00%	0.00%	0.00%
10)	6.01.01.2.02.0007	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Laporan	2	0	0%	7,286,000	-	7,286,000	0.00%	0.00%	0.00%
3	**6.01.01.2.03**	**Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah laporan Barang Milik Daerah**	**Dokumen**	**1**	**0**	**0%**	**11,590,000**	**1,905,000**	**9,685,000**	**16.44%**	**16.44%**	**25.00%**

NO	KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SATUAN INDIKATOR	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	% KINERJA	TARGET ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	SELISIH ANGGARAN	% KETERCAPAIAN ANGGARAN	% Anggaran	% Fisik
11)	6.01.01.2.03.000+B291	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	2	0	0%	2,190,000	-	2,190,000	0.00%	0.00%	0.00%
12)	6.01.01.2.03.0005	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	2	0	0%	4,380,000	1,095,000	3,285,000	25.00%	25.00%	25.00%
13)	6.01.01.2.03.0006	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	0	0%	5,020,000	810,000	4,210,000	16.14%	16.14%	25.00%
4	**6.01.01.2.05**	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah pegawai yang difasilitas**	**Orang**	**141**	**141**	**100%**	**1,294,134,000**	**140,450,000**	**1,153,684,000**	**10.85%**	**10.85%**	**25.00%**
14)	6.01.01.2.05.02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	3	1	33,33%	91,440,000	90,000,000	1,440,000	98.43%	98.43%	25.00%
15)	6.01.01.2.05.0009	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	141	10	7%	1,202,694,000	50,450,000	1,152,244,000	4.19%	4.19%	25.00%
5	**6.01.01.2.06**	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jenis**	**7**	**2**	**28%**	**4,585,290,500**	**742,718,700**	**3,842,571,800**	**16.20%**	**16.20%**	**25.00%**
16)	6.01.01.2.06.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5	1	20%	21,493,500	21,435,700	57,800	99.73%	99.73%	100.00%
17)	6.01.01.2.06.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	13	0	0%	1,272,374,000	-	1,272,374,000	0.00%	0.00%	0.00%

NO	KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SATUAN INDIKATOR	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	% KINERJA	TARGET ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	SELISIH ANGGARAN	% KETERCAPAIAN ANGGARAN	% Anggaran	% Fisik
18)	6.01.01.2.06.0003	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	50	2	4%	106,793,900	104,675,000	2,118,900	98.02%	98.02%	100.00%
19)	6.01.01.2.06.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	30	6	100%	284,032,100	278,800,000	5,232,100	98.16%	98.16%	100.00%
20)	6.01.01.2.06.0005	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	20	2	20%	154,580,000	151,967,000	2,613,000	98.31%	98.31%	100.00%
21)	6.01.01.2.06.0006	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	3	25%	9,284,000	1,590,000	7,694,000	17.13%	17.13%	100.00%
22)	6.01.01.2.06.0008	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4	1	25%	198,910,000	49,701,000	149,209,000	24.99%	24.99%	25.00%
23)	6.01.01.2.06.0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	1	25%	2,537,823,000	134,550,000	2,403,273,000	5.30%	5.30%	25.00%
6	**6.01.01.2.07**	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah barang milik daerah**	**Unit**	**8**	**0**	**0%**	**1,904,237,150**	**-**	**1,904,237,150**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**
24)	6.01.01.2.07.0005	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	4	0	0%	782,801,680	-	782,801,680	0.00%	0.00%	0.00%
25)	6.01.01.2.07.0006	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	7	0	0%	1,121,435,470	-	1,121,435,470	0.00%	0.00%	0.00%
7	**6.01.01.2.08**	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya Jasa Penunjang**	**Jenis**	**3**	**1**	**25%**	**698,697,500**	**131,107,000**	**567,590,500**	**18.76%**	**18.76%**	**25.00%**
26)	6.01.01.2.08.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	3	25%	6,444,000	-	6,444,000	0.00%	0.00%	0.00%

NO	KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SATUAN INDIKATOR	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	% KINERJA	TARGET ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	SELISIH ANGGARAN	% KETERCAPAIAN ANGGARAN	% Anggaran	% Fisik
27)	6.01.01.2.08.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	3	25%	692,253,500	131,107,000	561,146,500	18.94%	18.94%	20.00%
8	**6.01.01.2.09**	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah jenis kegiatan pemeliharaan barang milik daerah**	**Jenis**	**30**	**15**	**50.00%**	**2,244,268,247**	**199,485,180**	**2,044,783,067**	**8.89%**	**8.89%**	**0.00%**
28)	6.01.01.2.09.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	7	7	100%	257,529,948	35,296,024	222,233,924	13.71%	13.71%	15.00%
29)	6.01.01.2.09.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	30	30	100%	772,574,824	107,224,156	665,350,668	13.88%	13.88%	15.00%
30)	6.01.01.2.09.0005	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	5	0	0%	7,000,000	-	7,000,000	0.00%	0.00%	0.00%
31)	6.01.01.2.09.0006	Sub Kegiatan Pemeliharaan peralatan dan mesin lainya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	60	0	0%	266,400,000	56,965,000	209,435,000	21.38%	21.38%	25.00%
32)	6.01.01.2.09.0009	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	0	0%	837,090,000	-	837,090,000	0.00%	0.00%	0.00%
33)	6.01.01.2.09.0010	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	0	0%	103,673,475	-	103,673,475	0.00%	0.00%	0.00%

NO	KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SATUAN INDIKATOR	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	% KINERJA	TARGET ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	SELISIH ANGGARAN	% KETERCAPAIAN ANGGARAN	% Anggaran	% Fisik
B	**06.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**Prosentase Perangkat Daerah yang Melaksanakan 3E (Efektif, Efisien, Ekonomis)**	**Persen**	**66,07%**	**0.00%**	**0.00%**	**6,469,982,400**	**864,887,000**	**5,605,095,400**	**13.37%**	**13.37%**	**17.75%**
9	**6.01.02.1.01**	**Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	**Prosentase Laporan Temuan Hasil Pengawasan yang ditindaklanjuti**	**Laporan**	**2244**	**388**	**17.30%**	**5,324,010,400**	**864,887,000**	**4,459,123,400**	**16.25%**	**16.25%**	**17.75%**
34)	6.01.02.1.01.0001	Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan	1	0	0%	149,255,400	-	149,255,400	0.00%	0.00%	0.00%
35)	6.01.02.1.01.0002	Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan	122	1	1%	889,444,000	31,632,000	857,812,000	3.56%	3.56%	4.00%
36)	6.01.02.1.01.0003	Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Laporan	257	64	25%	1,436,232,000	522,220,000	914,012,000	36.36%	36.36%	37.00%
37)	6.01.02.1.01.0004	Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Laporan	213	1	0.47%	1,224,910,000	289,135,000	935,775,000	23.60%	23.60%	25.00%
38)	6.01.02.1.01.0005	Sub Kegiatan Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Laporan	248	0	0%	1,007,681,000	-	1,007,681,000	0.00%	0.00%	0.00%
39)	6.01.02.1.01.0006	Sub Kegiatan Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Kesepakatan	2	0	0%	128,600,000	-	128,600,000	0.00%	0.00%	0.00%
40)	6.01.02.1.01.0007	Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Dokumen	1154	280	24%	487,888,000	21,900,000	465,988,000	4.49%	4.49%	5.00%
10	**6.01.02.1.02**	**Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**	**Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**	**Laporan**	**74**	**1**	**0.15%**	**1,145,972,000**	-	**1,145,972,000**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**
41)	6.01.02.1.02.0001	Sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Laporan	4	1	25%	91,512,000	-	91,512,000	0.00%	0.00%	0.00%

NO	KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SATUAN INDIKATOR	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	% KINERJA	TARGET ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	SELISIH ANGGARAN	% KETERCAPAIAN ANGGARAN	% Anggaran	% Fisik
		Kerugian Negara / Daerah											
42)	6.01.02.1.02.0002	Sub Kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Laporan	685	0	0%	1,054,460,000	-	1,054,460,000	0.00%	0.00%	0.00%
C	**06.01.03**	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	**Prosentase Perangkat Daerah yang Memenuhi Kriteria Menuju Zona Integritas**	**Persen**	**100.00%**	**17.50%**	**17.50%**	**3,795,486,600**	**954,690,000**	**2,840,796,600**	**25.15%**	**25.15%**	**26.00%**
11	**06.01.03.1.01**	**Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis DI Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**	**Jumlah Rumusan Kebijakan yang dihasilkan**	**Dokumen**	**15**	**0**	**0%**	**527,295,000**	**-**	**527,295,000**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**
43)	06.01.03.1.01.0001	Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Rekomendasi	8	0	0%	527,295,000	-	527,295,000	0.00%	0.00%	0.00%
12	**06.01.03.1.02**	**Kegiatan Pendampingan dan Asistensi**	**Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi**	**Perangkat Daerah**	**63**	**22**	**35%**	**3,268,191,600**	**954,690,000**	**2,313,501,600**	**29.21%**	**29.21%**	**33.20%**
44)	06.01.03.2.02.0001	Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Perangkat Daerah	60	30	50%	1,703,448,600	547,905,000	1,155,543,600	32.16%	32.16%	33.00%
45)	06.01.03.2.02.0002	Sub Kegiatan Pendampingan , Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	4	0	0%	291,480,000	-	291,480,000	0.00%	0.00%	0.00%
46)	06.01.03.2.02.0003	Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Perangkat Daerah	13	0	0%	364,770,000	-	364,770,000	0.00%	0.00%	0.00%

NO	KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SATUAN INDIKATOR	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	% KINERJA	TARGET ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	SELISIH ANGGARAN	% KETERCAPAIAN ANGGARAN	% Anggaran	% Fisik
47)	06.01.03.2.02.0004	Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Perangkat Daerah	24	2	8%	908,493,000	406,785,000	501,708,000	44.78%	44.78%	50.00%
JUMLAH								**51,940,972,317**	**11,288,116,396**	**40,652,855,921**	**21.73%**	**21.73%**	**22.92%**

lnspektorat Daerah Kabupaten Tangerang pada tahun 2025 memiliki 3 Program, 12 Kegiatan dan 54 Sub Kegiatan.

Dari tabel diatas, realisasi anggaran serta pencapaian target dan kinerja Program dan Kegiatan s/d Triwulan I tahun 2025 secara umum dapat kami uraikan sebagai berikut:

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
Realisasi belanja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota sebesar **Rp. 9,468,539,396,00** atau **22,72%** dari anggaran **Rp 41,675,503,317,00** dengan capaian target indikato kinerja programnya sebesar **31,65%.** diarahkan pada 8 kegiatan dengan capaian realisasi sebagai berikut:
   - Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah telah terealisasi sebesar **Rp. 176,385,000,00** atau **43,90%** dari anggaran **Rp. 401,758,500,00** dengan capaian target indikator kinerja sebesar **43,90%.**
   - Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah telah terealisasi sebesar Rp. **8,076,488,516,00** dari anggaran **Rp. 30,535,527,420,00** atau **24,45%**, dengan capaian target indikator kinerja sebesar **77,00%.**
   - Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah telah terealisasi sebesar **Rp 1,905,000,00** dari anggaran **Rp. 11,590,000,00** atau **16,44%**, dengan capaian target indikator kinerja sebesar **0%.**
   - Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah telah terealisasi sebesar **Rp. 140,450,000,00** dari anggaran sebesar **Rp. 1,294,134,000,00** atau **10,85%** dengan capaian target indikator kinerja sebesar **6,79%.**
   - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah anggaran tahun 2025 sebesar **Rp. 4,585,290,500,00** telah terealisasi sebesar **Rp 742,718,700,00** atau **16,20%** dengan capaian target indikator kinerja sebesar **37.50%.**
   - Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah anggaran tahun 2025 sebesar **Rp. 1,904,237,150,00** telah terealisasi sebesar **Rp. 0,00** atau **0,00%** dengan capaian target indikator kinerja sebesar **0,00%.**
   - Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah anggaran tahun 2025 sebesar **Rp. 698,697,500,00** telah terealisasi sebesar **Rp. 0,00** atau **0,00%** dengan capaian target indikator kinerja sebesar **0,00%.**
   - Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah anggaran tahun 2025 sebesar **Rp. 2,244,268,247,00** telah terealisasi sebesar **Rp. 199,485,180,00** atau **8,89%** dengan capaian target indikator kinerja sebesar **33.33%.**

b. Program Penyelenggaraan Pengawasan
Program Penyelenggaraan Pengawasan Tahun 2025 sebesar **Rp. 10.275.837.862,00** terealisasikan sebesar **Rp. 1.865.888.800,00** atau **18,16%.** Dengan capaian target indikator kinerja programnya sebesar **30,16%** diarahkan pada 2 kegiatan dengan capaian realisasi sebagai berikut:

- Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal anggaran tahun 2025 sebesar **Rp. 5,324,010,400,00** telah terealisasi sebesar **Rp. 864,887,000,00** atau **16.25%** dengan capaian target indicator kinerja sebesar **17.30%.**
- Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu anggaran tahun 2025 sebesar **Rp. 1,145,972,000,00** telah terealisasi sebesar **Rp. 0,00** atau **0,00%** dengan capaian target indicator kinerja sebesar **0,15%.**

c. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
Realisasi belanja Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi sebesar **8,58%** atau **Rp. 342.170.000,00** dari anggaran sebesar **Rp. 3.989.732.800,00** diarahkan pada 2 kegiatan dengan capaian realisasi sebagai berikut:
   - Perumusan Kebijakan Teknis Di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan anggaran tahun 2025 sebesar **Rp. 527,295,000,00** telah terealisasikan sebesar **Rp. 0,00** atau **0,00%** dengan capaian target indikator kinerja sebesar **0,00%.**
   - Kegiatan kegiatan Pendampingan dan Asistensi anggaran tahun 2025 sebesar **Rp. 3,268,191,600,00** telah terealisasi sebesar **Rp. 954,690,000,00** atau **29,21%**. Dengan total capaian target indikator kinerja sebesar **35,00%.**

Terdapat beberapa faktor penyebab realisasi anggaran triwulan I tidak terserap secara optimal, antara lain:

a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN silpa triwulan I sebesar Rp. 673.788.703,- disebabkan oleh adanya perencanaan penganggaran gaji dan tunjangan untuk CPNS dan PPPK yang dimulai pada bulan Februari, namun terhitung mulai tugas pada bulan April.;
   Solusi : akan melakukan rekonsiliasi gaji sesuai kebutuhan dengan Bidang Anggaran di Bulan Mei 2025.
b. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD silpa Triwulan I sebesar Rp.453.010.000,- disebabkan karena belum masuk laporan karena penggantian uang atas SPJ yang diajukan pada 25 Maret 2025 belum diproses.;
   Solusi : realisasi anggaran masuk ke bulan april dikarenakan sistem baru posting di bulan tersebut.
c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor silpa Triwulan I sebesar Rp. 40.551.000,- dikarenakan belum terlaksananya proses dokumentasi atas setiap pelaksanaan kegiatan pengawasan

   Solusi : silpa di geser ke triwulan II dan pelaksanaan dilakukan mulai bulan April 2025.

d. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan silpa triwulan I sebesar Rp. 24.331.463,-Dikarenakan penyerapan anggaran pemeliharaan kendaraan dinas jabatan sesuai dengan riil cost.
   Solusi : melakukan penyesuaian pada saat perubahan Anggaran 2025 di bulan Oktober.

e. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan silpa triwulan I sebesar **Rp. 80.480.800,-** Dikarenakan Kurang terserapnya realisasi dari anggaran atas belanja bahan bakar dan pemeliharaan kendaraan dinas operasional dengan nomor polisi A 1390 W dan A 1391 W yang tidak terserap karena aset tersebut telah usang dan sedang diajukan penghapusan ke bidang aset serta sisa anggaran dari belanja bahan bakar dan pemeliharaan kendaraan dinas operasional yang ada.
   Solusi : melakukan penyesuaian pada saat perubahan Anggaran 2025 di bulan Oktober
f. Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja silpa triwulan I sebesar Rp. 60.014.000,- dikarenakan terdapat perubahan lokasi kegiatan untuk Reviu LPPD yang semula di jawa barat menjadi banten akibat dampak efisiensi anggaran sesuai inpres nomor 1 tahun 2025
   Solusi : melakukan penyesuaian pada saat perubahan Anggaran 2025 di bulan Oktober
g. Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah silpa triwulan I sebesar Rp. 237.655.000,- dikarenakan belum selesainya laporan dari tenaga ahli atas pelaksanaan kegiatan pemeriksaan pekerjaan probity audit.
   Solusi : silpa di geser ke triwulan II dan pelaksanaan dilakukan mulai bulan April 2025.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Indikator kinerja utama (IKU) Inspektorat Tahun 2025 – 2026 sebagai berikut:

1) Nilai Maturitas SPIP;
2) Nilai Manajemen Risiko Indeks (MRI);
3) Nilai Indeks Efektivitas Pengelolaan Korupsi (IEPK);
4) Nilai Kapabilitas APIP;
5) Nilai AKIP Inspektorat Kabupaten Tangerang.

Analisis kinerja pelayanan Inspektorat Kabupaten Tangerang sesuai dengan RENSTRA INSPEKTORAT tertuang dalam capaian sasaran Strategis Tahun 2025 - 2026 pada Tabel 2.3 sebagai berikut:

Tabel 2. 3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Inspektorat Kabupaten Tangerang (Tabel T-C.30)

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2024	2025	2026	2023	2024*	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Nilai Maturitas SPIP	Nilai	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3.36	3.37	3.38	3.016	3.359	3.37	3.38	
2	Nilai Manajemen Risiko Indeks (MRI)	Nilai		3.27	3.28	3.29	3	3.266	3.28	3.29	
3	Nilai Indeks Efektivitas Pengelolaan Korupsi (IEPK)	Nilai		3.1	3.105	3.2	3.072	3.142	3.105	3.2	
4	Nilai Kapabilitas APIP	Nilai	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	3.1	3.12	3.15	3.15	3.19	3.12	3.15	
5	Nilai AKIP Inspektorat Kabupaten Tangerang	Nilai AKIP		82.91	83.33	83.74	85,30	87,40	83,33	83,74	

Dari tabel di atas dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut :

a. Penilaian untuk Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Tangerang Tahun 2025 belum dapat diketahui karena hasil penilaian dari QA BPKP di triwulan IV Tahun berjalan.
b. Realisasi Capaian IKU Inspektorat Tahun Anggaran 2024 antara lain 1) Nilai Maturitas SPIP sebesar 3.359, 2) Nilai Manajemen Risiko Indeks sebesar 3.266, 3) Nilai Indeks Efektivitas Pengelolaan Korupsi (IEPK) sebesar 3.142, 4) Nilai Kapabilitas APIP sebesar 3.19, dan 5) Nilai AKIP Inspektorat Kabupaten Tangerang tahun sebesar 87,40.

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan serta saran perbaikan untuk Inspektorat Kabupaten Tangerang Tahun 2025:

1. Kurangnya kesadaran Perangkat Daerah atas pengendalian tindak korupsi.
2. Masih terdapat temuan berulang meskipun opini LKPD telah WTP berturut-turut selama kurun waktu 5 tahun.
3. Masih banyak OPD yang belum memahami pentingnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, sehingga dalam pelaksanaan penilaian mandiri diketahui bahwa masih banyak OPD yang mengesampingkan kegiatan-kegiatan yang bersifat pembenahan tatakelola pemerintahan.
4. Masih minimnya SDM yang mengampu analisa dan pengelolaan data dan administrasi hasil pengawasan di setiap bidang, sehingga beberapa arsip tidak terdokumentasikan dengan baik.

Selama ini Inspektorat Kabupaten Tangerang terus berupaya meningkatkan maturitas SPIP, dalam hal ini Inspektorat selaku assessor telah melakukan :

1. Pembinaan kepada OPD terkait substansi penilaian resiko dan pengelolaannya, termasuk kepada Bappeda selaku OPD yang melakaksanakan fungsi perencanaan, sehingga pengelolaan resiko dapat berguna sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan perencanaan;
2. Pendampingan ke OPD untuk penyusunan rencana tindak pengendalian risiko (RTP).
3. Selalu meningkatkan kualitas pengelolaan resiko, meliputi perumusan resiko, penyebab, rencana tindak pengendalian (RTP) dan pemantauan terhadap pelaksanaan RTP, termasuk penyusunan resiko atas tujuan strategis pemerintah daerah;
4. Meningkatnya pemahaman atas substansi dari sistem pengendalian internal dan pengelolaan resiko, sehingga terbentuk pola manajemen resiko yang handal untuk pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tangerang;
5. APIP Pemerintah Kabupaten Tangerang telah melaksanakan pengawasan melalui audit kinerja dengan lingkup efektivitas, efisiensi dan kehematan pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang;
6. Menyusun Program Pengawasan Berbasis Resiko Strategis;
7. Peningkatan kualitas Program Kerja Pengawasan Tahunan

Berbasis Resiko, dengan menetapkan dokumen Perencanaan Pengawasan Berbasis Resiko (PPBR) yang telah mempertimbangkan hasil penilaian resiko pada seluruh Perangkat Daerah; serta

8. Peningkatan kualitas audit kinerja sehingga dapat menilai aspek ekonomis, efisen dan efektivitas atas pelaksanaan program strategis dengan mempertimbangkan hasil penilaian resiko pada masing-masing Perangkat Daerah.
9. Memperhatikan dan akan menindaklanjuti saran-saran dari hasil penilaian maturitas SPIP oleh BPKP Perwakilan Banten
10. Melakukan monitoring dan tindak lanjut terkait Manajemen Risiko secara kontinu/terus menerus.
11. Mengadakan kembali sosialisasi SPIP, agar mengerti dan merasa perlu betapa pentingnya SPIP.
12. Melaksanakan bimbingan teknis penilaian resiko strategis pemerintah daerah, resiko strategis Perangkat Daerah, dan resiko operasional (kegiatan) Perangkat Daerah dengan tujuan memperbaiki kualitas rumusan resiko, penyebab, dampak, MR sehingga relevan dengan upaya pencapaian tujuan strategis yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan Renstra.
13. Melaksanakan penilaian resiko strategis pemerintah daerah dan dimutakhirkan secara berkala.
14. Melaksanakan penilaian resiko strategis Perangkat Daerah dan dimutakhirkan secara berkala.
15. Melaksanakan penilaian resiko operasional (kegiatan) Perangkat Daerah dan dimutakhirkan secara berkala.
16. Melakukan audit kinerja secara current period untuk memperbaiki tata kelola, pengendalian intern dan pengelolaan resiko pada Perangkat Daerah, serta mencegah terjadinya penyimpangan.

Adapun langkah-langkah yang diambil oleh Inspektorat dan upaya tindak lanjut untuk meningkatkan nilai maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten Tangerang dengan menyusun rencana aksi, diantaranya :

1. Melakukan audit kinerja secara current period untuk memperbaiki tata kelola, pengendalian intern dan pengelolaan resiko pada Perangkat Daerah, serta mencegah terjadinya penyimpangan;
2. Meningkatkan pemahaman dan keterlibatan OPD dalam penerapan sistem pengendalian;
3. Mengadakan bimbingan teknis kepada pegawai terkait implementasi SPIP;
4. Membentuk Unit Manajemen Risiko di OPD dimana Setiap OPD diwajibkan memiliki unit khusus yang bertanggung jawab terhadap penerapan manajemen risiko.
5. Melaksanakan pelatihan bagi tim OPD agar lebih kompeten dalam analisis dan mitigasi risiko;
6. Meningkatkan cakupan peta risiko hingga unit-unit kerja di tingkat kecamatan;
7. Meningkatkan keterlibatan Inspektorat dalam pendampingan pengelolaan keuangan dan pengadaan barang/jasa;
8. Penerapan Sistem Whistleblowing yang Lebih Efektif dengan mengembangkan mekanisme perlindungan pelapor agar lebih aman dan anonim.

9. Mengadakan sosialisasi/pelatihan anti-korupsi bagi aparatur sipil negara di OPD.
10. Meningkatkan koordinasi dengan KPK, BPKP, dan Kejaksaan dalam menindaklanjuti pengaduan korupsi
11. Peningkatan SDM APIP melalui Sertifikasi dengan Mengadakan pelatihan dan sertifikasi bagi APIP internal guna meningkatkan kompetensi profesional mereka;
12. Mengoptimalkan penggunaan sistem berbasis IT dalam pengawasan internal, seperti audit digital dan analisis big data;
13. Mewajibkan setiap OPD untuk berkoordinasi dengan Inspektorat dalam setiap evaluasi program dan kegiatan;
14. Menjadikan hasil reviu dan tindak lanjut lebih terukur dengan pelaporan berkala.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Inspektorat Kabupaten Tangerang selaku Perangkat Daerah bidang pengawasan mendukung tujuan Kabupaten Tangerang, yaitu: "Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik melalui Digitalisasi dan Integrasi Pelayanan Publik". Pada tujuan ini peran Inspektorat Kabupaten Tangerang terkait dengan upaya peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik, demokratis dan partisipatif terhadap berbagai pelaksanaan tugas dan pembangunan yang dilakukan oleh segenap aparatur di jajaran birokrasi Pemerintah Kabupaten Tangerang sehingga diharapkan tujuan pembangunan daerah yang dicita-citakan benar-benar dapat diwujudkan.

lsu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi lnspektorat adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan karena dampaknya yang signifikan di masa depan. Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Tingkat kinerja pelayanan Inspektorat Kabupaten Tangerang telah sesuai dengan target yang ditetapkan terutama untuk Program Peningkatan Pengawasan Sistem Pengawasan Internal yang merupakan program utama Inspektorat dapat tercapai sesuai target namun masih menjadi tantangan kita bersama unutk menyelesaikan beberapa rekomendasi yang masih tertunda dari rekomendasi BPK RI.

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif berbagai solusi telah dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Tangerang, yaitu:

1) Keberhasilan Inspektorat Kabupaten Tangerang dalam penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan baik internal maupun eksternal adalah karena koordinasi dan komunikasi intensif dengan semua auditan akan arti pentingnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan sesegera mungkin. Komitmen pimpinan juga berperan penting dalam pencapaian keberhasilan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan.
2) Telah ada koordinasi dan sinergi program antara Inspektorat Kabupaten Tangerang dengan Inspektorat Provinsi Banten maupun

Inspektorat dan Kementrian tingkat pusat karena setiap tahun selalu ada Rakorwas (Rapat Koordinasi Pengawasan) tingkat Provinsi yang melibatkan semua inspektorat kabupaten kota se-Provinsi Banten maupun tingkat Nasional (Rakorwasnas) yang melibatkan seluruh inspektorat provinsi, kabupaten kota dan Irjend Kementrian.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Tangerang antara lain :

1) Ketugasan Inspektorat sebagai koordinator pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam mendukung terwujudnya Good Governance tersebut adalah belum adanya unsur–unsur/sub unsur yang diperlukan untuk dapat melaksanakan SPIP antara lain masih ada OPD yang belum taat terhadap kebijakan yang memuat metode identifikasi resiko, aksi penanganan resiko, pengendalian resiko sistem informasi, SOP penggunaan sistem informasi, pengamanan atas fasilitas dan aset penting, evaluasi atas ukuran dan indikator kinerja secara periodik.
2) Masih ada permasalahan lain seperti belum ada rencana pemulihan bila terjadi bencana, masih terdapat kebijakan yang diambil pimpinan belum didasarkan pada hasil penilaian resiko yang sistematis, serta masih adanya rekomendasi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) yang belum ditindaklanjuti dan saran dari BPKP yang perlu ditindaklanjuti di tahun 2022.
3) Permasalahan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) baik dari segi jumlah maupun kualitas belum memadai (belum sesuai dengan kebutuhan). Berdasarkan Analisa jabatan bezzeting Kemenpan-RB bahwa formasi yang diperlukan sejumlah 113 Pegawai Fungsional terdiri dari 5 Auditor Madya, 15 Auditor Muda, 45 Auditor Pertama, 5 P2UPD Madya, 15 P2UPD Muda, dan 28 P2UPD Pertama, namun baru terisi sebanyak 67 Pegawai Fungsional terdiri dari 4 Auditor Madya, 14 Auditor Muda, 24 Auditor Pertama, 4 P2UPD Madya, 8 P2UPD Muda, dan 13 P2UPD Pertama.

Tantangan dalam meningkatkan pelayanan Inspektorat Kabupaten Tangerang antara lain:

1) Dalam rangka mendukung terwujudnya *Good Governance* (tata kelola pemerintahan yang baik), yang meliputi unsur meningkatnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik, meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, serta meningkatnya profesionalisme SDM aparatur, maka fungsi pengawasan memegang peran penting dan strategis.
2) Melalui pengawasan yang efektif diharapkan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan akan berjalan efektif dan efisien, serta dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan reformasi birokrasi yang didukung sistem pengendalian intern pemerintah. Berdasar Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP); semua pemerintah daerah diharapkan dapat menerapkan dan melaksanakan SPIP. SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas

dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan keamanan asset Negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan identifikasi permasalahan serta memperhatikan analisis terkait dengan tantangan dan peluang, faktor pendorong dan penghambat, serta hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Tangerang, maka dapat ditetapkan isu penting lnspektorat Daerah Kabupaten Tangerang adalah:

1. Kuantitas dan Kualitas SDM APIP belum sesuai standar yang disarankan sesuai ketentuan
2. Pengendalian Pencegahan Korupsi Perangkat Daerah belum Optimal

2.4. Review terhadap Rancangan RKPD Perubahan

Adanya perubahan / review terhadap program dan rancangan awal RKPD Perubahan dari hasil analisis kebutuhan untuk Renja Perubahan Tahun 2025 antara lain disebabkan karena :

1) Adanya beberapa kebijakan baru dari pemerintah pusat dengan nomenlatur program, kegiatan, sub kegiatan yang baru.
2) Penyesuaian Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 sebagai dasar untuk penyusunan program kerja pengawasan tahunan (PKPT) tahun anggaran 2024.
3) Pelaksanaan SIPD yang belum stabil dan masih berubah ubah di dalam aplikasinya.
4) Hasil evaluasi Gubernur Banten terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Inspektorat Kabupaten Tangerang bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 11 Tahun 2024 ; Nomor 700.1/3013/SJ ; Nomor HK.01.00/SE.3/K/D3/2024 perihal Penguatan Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa alokasi anggaran pengawasan untuk Kabupaten/Kota dengan total Belanja Daerah di atas Rp. 2.000.000.000.000,- adalah sebesar 0,50% dari total belanja. Alokasi anggaran pengawasan sebagaimana dimaksud di atas tidak termasuk belanja gaji dan tunjangan.
5) Belanja Tunjangan Kinerja sesuai ketentuan dan kebijakan yang baru dengan menggunakan 3 kode rekening yang berbeda, yaitu Tunjangan Kinerja berdasarkan Beban Kerja, Tunjangan Kinerja berdasarkan Kondisi Kerja, dan Tunjangan Kinerja berdasarkan Prestasi Kerja.
6) Penyesuaian administrasi penatausahaan keuangan menggunakan system yang baru.
7) Tidak ada lagi belanja bersifat BTL dan BL.
8) Pembayaran honor tenaga non PNS hanya yang mendapat rekomendasi dari TAPD.

Berdasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pasal 48, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 88 Tahun 2022 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023, maka:

1) Kegiatan pengawasan dapat mencakup kegiatan audit, pembinaan, pemantauan, evaluasi, serta kegiatan pengawasan lainnya seperti pembimbingan, asistensi, konsultasi, pengelolaan hasil pengawasan, dan pemaparan hasil pengawasan.
2) Pengawasan internal ditekankan pada sifat prefentif (mencegah terjadinya penyimpangan), pengawasan tidak lagi mencari-cari temuan, namun membina dan memberi peringatan indikasi pelanggaran dan penyimpangan (*early warning system*).

Untuk melakukan reviu terhadap rancangan awal RKPD Perubahan Tahun 2025maka perlu dilihat kembali Permendagri No 19 Tahun 2019 yaitu nomenklatur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta penyesuaian output, outcome dan anggaran serta Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Kepmendagri Nomor 050-5889 tahun 2021 terkait pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Adapun Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025 pada tabel 2.4 sebagai berikut

Tabel 2. 4
Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025 Inspektorat Kabupaten Tangerang (Tabel T-C.31)

RANCANGAN AWAL RKPD							ANALISA HASIL KEBUTUHAN						Catatan Penting
NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SATUAN INDIKATOR	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SATUAN INDIKATOR	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN						**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**						
	INSPEKTORAT DAERAH						**INSPEKTORAT DAERAH**						
A	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kab. Tangerang**	**Persentase Ketercapaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persen**	**100.00%**	**36,655,947,049**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kab. Tangerang**	**Persentase Ketercapaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persen**	**100.00%**	**42,555,100,038**	
1	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kab. Tangerang**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Dokumen**	**5**	**635,708,000**	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kab. Tangerang**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Dokumen**	**5**	**401,758,500**	
1)	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Tangerang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	402,635,000	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Tangerang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	202,215,500	
2)	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Kab. Tangerang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	9,250,000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Kab. Tangerang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	8,030,000	
3)	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Tangerang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	2	27,750,000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Tangerang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	2	24,455,000	
4)	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Tangerang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	13,690,000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Tangerang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	11,252,000	
5)	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kab. Tangerang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Dokumen	2	41,070,000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kab. Tangerang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Dokumen	2	34,837,000	

RANCANGAN AWAL RKPD							ANALISA HASIL KEBUTUHAN						Catatan Penting
NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SATUAN INDIKATOR	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SATUAN INDIKATOR	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
			Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD						Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				
6)	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Tangerang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	91,585,000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Tangerang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	75,397,000	
7)	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Tangerang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	12	49,728,000	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Tangerang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	12	45,572,000	
2	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kab. Tangerang**	**Jumlah Laporan Keuangan**	**Dokumen**	**2**	**27,931,158,467**	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kab. Tangerang**	**Jumlah Laporan Keuangan**	**Dokumen**	**2**	**31,402,311,581**	
8)	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Tangerang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	111	27,906,288,467	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Tangerang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	111	31,384,461,581	
9)	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Tangerang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	14,408,000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Tangerang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	10,564,000	
10)	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Tangerang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Laporan	2	10,462,000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Tangerang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Laporan	2	7,286,000	
3	**Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		**Jumlah laporan Barang Milik Daerah**	**Dokumen**	**1**	**16,462,000**	**Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		**Jumlah laporan Barang Milik Daerah**	**Dokumen**	**1**	**11,590,000**	
11)	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Tangerang	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	2	3,791,000	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Tangerang	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	2	2,190,000	

RANCANGAN AWAL RKPD							ANALISA HASIL KEBUTUHAN						Catatan Penting
NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SATUAN INDIKATOR	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SATUAN INDIKATOR	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
12)	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Tangerang	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	2	5,920,000	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Tangerang	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	2	4,380,000	
13)	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Tangerang	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	6,751,000	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Tangerang	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	5,020,000	
4	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kab. Tangerang**	**Jumlah pegawai yang difasilitas**	**Orang**	**141**	**1,395,031,000**	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kab. Tangerang**	**Jumlah pegawai yang difasilitas**	**Orang**	**141**	**1,218,189,000**	
14)	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Tangerang	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	3	376,020,000	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Tangerang	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	91,440,000	
15)	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Tangerang	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pegawai	141	1,019,011,000	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Tangerang	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pegawai	141	1,126,749,000	
5	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kab. Tangerang**	**Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jenis**	**7**	**3,652,910,200**	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kab. Tangerang**	**Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jenis**	**7**	**4,838,653,500**	
16)	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Tangerang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5	21,493,500	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Tangerang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5	51,493,500	
17)	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Tangerang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	13	240,068,000	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Tangerang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	13	1,396,489,000	
18)	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Tangerang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	50	15,296,500	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Tangerang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	2	106,793,900	
19)	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Tangerang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	30	420,010,000	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Tangerang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	6	284,032,100	
20)	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Tangerang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	20	30,747,000	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Tangerang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	154,580,000	

RANCANGAN AWAL RKPD							ANALISA HASIL KEBUTUHAN						Catatan Penting
NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SATUAN INDIKATOR	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SATUAN INDIKATOR	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
21)	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Tangerang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	8,280,000	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Tangerang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	9,284,000	
22)	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Tangerang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4	198,920,000	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Tangerang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4	224,460,000	
23)	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Tangerang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	2,718,095,200	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Tangerang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	2,611,521,000	
6	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kab. Tangerang**	**Jumlah barang milik daerah**	**Unit**	**8**	**453,927,800**	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kab. Tangerang**	**Jumlah barang milik daerah**	**Unit**	**8**	**1,747,281,710**	
24)	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Kab. Tangerang	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	4	187,650,000	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Kab. Tangerang	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	2	782,801,680	
25)	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Tangerang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	7	266,277,800	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Tangerang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	7	964,480,030	
7	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab. Tangerang**	**Tersedianya Jasa Penunjang**	**Jenis**	**3**	**307,415,000**	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab. Tangerang**	**Tersedianya Jasa Penunjang**	**Jenis**	**3**	**679,972,500**	
26)	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Tangerang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	17,760,000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Tangerang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	6,444,000	
27)	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Tangerang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	289,655,000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Tangerang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	673,528,500	
8	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab. Tangerang**	**Jumlah jenis kegiatan pemeliharaan barang milik daerah**	**Jenis**	**30**	**2,263,334,582**	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab. Tangerang**	**Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persen**	**100%**	**2,255,343,247**	
28)	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan	Kab. Tangerang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang	Unit	7	278,768,800	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan	Kab. Tangerang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang	Unit	7	257,529,948	

RANCANGAN AWAL RKPD							ANALISA HASIL KEBUTUHAN						Catatan Penting
NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SATUAN INDIKATOR	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SATUAN INDIKATOR	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
	Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				
29)	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Tangerang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	30	643,627,600	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Tangerang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	30	778,974,824	
30)	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Kab. Tangerang	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	5	21,000,000	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Kab. Tangerang	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	5	7,000,000	
31)	Sub Kegiatan Pemeliharaan peralatan dan mesin lainya	Kab. Tangerang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	60	240,500,000	Sub Kegiatan Pemeliharaan peralatan dan mesin lainya	Kab. Tangerang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	30	266,400,000	
32)	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Tangerang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1,058,438,182	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Tangerang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	841,765,000	
33)	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Tangerang	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	21,000,000	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Tangerang	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	103,673,475	
B	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**Kab. Tangerang**	**Prosentase OPD yang Melaksanakan 3E (Efektif, Efisien, Ekonomis)**	**Persen**	**66,07%**	**14,767,962,400**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**Kab. Tangerang**	**Prosentase OPD yang Melaksanakan 3E (Efektif, Efisien, Ekonomis)**	**Persen**	**100.00%**	**6,845,588,400**	
9	**Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	**Kab. Tangerang**	**Jumlah Laporan Temuan Hasil Pengawasan yang ditindaklanjuti**	**Laporan**	**2244**	**10,563,089,400**	**Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	**Kab. Tangerang**	**Jumlah Laporan Temuan Hasil Pengawasan yang ditindaklanjuti**	**Laporan**	**2244**	**5,699,616,400**	
34)	Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kab. Tangerang	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan	1	1,660,852,000	Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kab. Tangerang	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan	1	23,129,400	
35)	Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab. Tangerang	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan	122	1,188,010,800	Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab. Tangerang	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan	122	983,045,000	
36)	Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja	Kab. Tangerang	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Laporan	257	2,220,801,200	Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja	Kab. Tangerang	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Laporan	257	1,474,878,000	
37)	Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan	Kab. Tangerang	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Laporan	213	3,081,453,200	Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan	Kab. Tangerang	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Laporan	213	1,224,910,000	
38)	Sub Kegiatan Pengawasan Desa	Kab. Tangerang	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Laporan	248	1,116,124,000	Sub Kegiatan Pengawasan Desa	Kab. Tangerang	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Laporan	248	1,007,681,000	

RANCANGAN AWAL RKPD							ANALISA HASIL KEBUTUHAN						Catatan Penting
NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SATUAN INDIKATOR	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SATUAN INDIKATOR	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
39)	Sub Kegiatan Kerjasama Pengawasan Internal	Kab. Tangerang	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Kesepakatan	2	143,046,000	Sub Kegiatan Kerjasama Pengawasan Internal	Kab. Tangerang	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Kesepakatan	2	128,600,000	
40)	Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Kab. Tangerang	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Dokumen	1154	1,152,802,200	Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Kab. Tangerang	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Dokumen	1154	857,373,000	
10	**Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**	**Kab. Tangerang**	**Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**	**Laporan**	**74**	**4,204,873,000**	**Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**	**Kab. Tangerang**	**Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**	**Laporan**	**74**	**1,145,972,000**	
41)	Sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara / Daerah	Kab. Tangerang	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Laporan	4	118,656,000	Sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara / Daerah	Kab. Tangerang	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Laporan	4	91,512,000	
42)	Sub Kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Kab. Tangerang	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Laporan	685	4,086,217,000	Sub Kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Kab. Tangerang	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Laporan	685	1,054,460,000	
C	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	**Kab. Tangerang**	**Prosentase Perangkat Daerah yang Memenuhi Kriteria Menuju Zona Integritas**	**Persen**	**100.00%**	**6,427,395,000**	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	**Kab. Tangerang**	**Prosentase Perangkat Daerah yang Memenuhi Kriteria Menuju Zona Integritas**	**Persen**	**100.00%**	**4,230,340,400**	
11	**Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis DI Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**	**Kab. Tangerang**	**Jumlah Rumusan Kebijakan yang dihasilkan**	**Dokumen**	**15**	**1,180,065,200**	**Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis DI Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**	**Kab. Tangerang**	**Jumlah Rumusan Kebijakan yang dihasilkan**	**Dokumen**	**15**	**561,750,000**	
43)	Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Di Bidang Pengawasan	Kab. Tangerang	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Rekomendasi	8	1,180,065,200	Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Di Bidang Pengawasan	Kab. Tangerang	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Rekomendasi	8	561,750,000	
12	**Kegiatan Pendampingan dan Asistensi**	**Kab. Tangerang**	**Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi**	**Perangkat Daerah**	**63**	**5,247,329,800**	**Kegiatan Pendampingan dan Asistensi**	**Kab. Tangerang**	**Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi**	**Perangkat Daerah**	**63**	**3,668,590,400**	
44)	Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Tangerang	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan	Perangkat Daerah	60	3,369,007,200	Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Tangerang	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan	Perangkat Daerah	60	1,703,448,600	

RANCANGAN AWAL RKPD							ANALISA HASIL KEBUTUHAN						Catatan Penting
NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SATUAN INDIKATOR	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SATUAN INDIKATOR	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
			Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah						Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				
45)	Sub Kegiatan Pendampingan , Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kab. Tangerang	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	4	158,610,800	Sub Kegiatan Pendampingan , Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kab. Tangerang	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	4	291,480,000	
46)	Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kab. Tangerang	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kegiatan	13	321,336,800	Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kab. Tangerang	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kegiatan	13	765,168,800	
47)	Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Kab. Tangerang	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Perangkat Daerah	24	1,398,375,000	Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Kab. Tangerang	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Perangkat Daerah	24	908,493,000	
JUMLAH						**57,851,304,449**	**JUMLAH**					**53,631,028,838**	

Dapat dilihat dari tabel 2.4 bahwa ada tahun 2025, Inspektorat Kabupaten Tangerang mengalami perubahan signifikan dalam kinerja dan alokasi anggaran yang mencakup 3 program, 12 kegiatan, dan 54 sub kegiatan. Perubahan ini merupakan tindak lanjut dari diterbitkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 Tanggal 22 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
    a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
        1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah anggaran murni sebesar Rp. 402,635,000,- berubah anggaran menjadi sebesar Rp. 202,215,500,- atau mengalami penurunan sebesar Rp. 200,419,500,- hal ini dikarenakan implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 Tanggal 22 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
        2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD anggaran murni sebesar Rp. 9,250,000,- berubah anggaran menjadi sebesar Rp. 8,030,000,- atau mengalami penurunan sebesar Rp. 1,220,000,- hal ini dikarenakan implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 Tanggal 22 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
        3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD anggaran murni sebesar Rp. 27,750,000,- berubah anggaran menjadi sebesar Rp. 24,455,000,- atau mengalami penurunan sebesar Rp. 3,295,000,- hal ini dikarenakan implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 Tanggal 22 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
        4) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD anggaran murni sebesar Rp. 13,690,000,- berubah anggaran menjadi sebesar Rp. 11,252,000,- atau mengalami penurunan sebesar Rp 2,438,000,- hal ini dikarenakan implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 Tanggal 22 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
        5) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD anggaran murni sebesar Rp. 41,070,000,- berubah anggaran menjadi sebesar Rp. 34,837,000,- atau mengalami penurunan sebesar Rp. 6,233,000,- hal ini dikarenakan implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 Tanggal 22 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja

Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

6) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD anggaran murni sebesar Rp 91,585,000,- berubah anggaran menjadi sebesar Rp. 75,397,000,- atau mengalami penurunan sebesar Rp. 16,188,000,- hal ini dikarenakan implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 Tanggal 22 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
7) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah anggaran murni sebesar Rp 49,728,000,- berubah anggaran menjadi sebesar Rp. 45,572,000,- atau mengalami penurunan sebesar Rp 4,156,000,- hal ini dikarenakan implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 Tanggal 22 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan. dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN anggaran murni sebesar Rp. 27,906,288,467,- berubah anggaran menjadi sebesar Rp. 31,384,461,581,- atau mengalami kenaikan sebesar Rp. 3,478,173,114,- hal ini dikarenakan penyesuaian kebutuhan pegawai CPNS dan CPPPK setelah rekonsiliasi Gaji dan Tunjangan Pegawai.
2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD anggaran murni sebesar Rp. 14,408,000,- berubah anggaran menjadi sebesar Rp. 10,564,000,- atau mengalami penurunan sebesar Rp. 3,844,000,- hal ini dikarenakan implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 Tanggal 22 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan. dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD anggaran murni sebesar Rp. 10,462,000,- berubah anggaran menjadi sebesar Rp. 7,286,000,- atau mengalami penurunan sebesar Rp. 3,176,000,- hal ini dikarenakan implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 Tanggal 22 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan. dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
1) Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya murni sebesar Rp. 376,020,000,- berubah anggaran menjadi sebesar Rp. 91,440,000,- hal ini dikarenakan implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor

1 Tahun 2025 Tanggal 22 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan. dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

2) Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi anggaran murni sebesar Rp. 1,019,011,000,- berubah anggaran menjadi sebesar Rp. 1,126,749,000,- atau mengalami kenaikan sebesar Rp. 538,041,800,- hal ini dikarenakan rencana anggaran untuk pendidikan dan pelatihan di triwulan IV belum dianggarkan di APBD Murni.

d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor anggaran murni sebesar Rp. 21,493,500,- berubah anggaran menjadi sebesar Rp. 51,493,500,- atau mengalami kenaikan sebesar Rp. 30,000,000,- hal ini dikarenakan rencana anggaran untuk kebutuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor di triwulan IV belum dianggarkan di APBD Murni.

2) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor anggaran murni sebesar Rp. 240,068,000,- berubah anggaran menjadi sebesar Rp. 1,396,489,000,- atau mengalami kenaikan sebesar Rp 124,115,000,- hal ini dikarenakan rencana anggaran untuk kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor di triwulan IV belum dianggarkan di APBD Murni.

3) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor anggaran murni sebesar Rp 420,010,000,- berubah anggaran menjadi sebesar Rp. 284,032,100,- atau mengalami penurunan sebesar Rp. 135,977,900,- hal ini dikarenakan implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 Tanggal 22 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan. dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

4) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan anggaran murni sebesar Rp. 30,747,000,- berubah anggaran menjadi sebesar Rp. 154,580,000,- atau mengalami perubahan sebesar Rp. 42,168,000,- hal ini dikarenakan rencana anggaran untuk kebutuhan Barang Cetakan dan Penggandaan di triwulan IV belum dianggarkan di APBD Murni.

5) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan anggaran murni sebesar Rp. 8,280,000,- berubah anggaran menjadi sebesar Rp 9,284,000,- atau mengalami perubahan sebesar Rp. 1,004,000,- hal ini dikarenakan rencana anggaran untuk kebutuhan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan di triwulan IV belum dianggarkan di APBD Murni.

6) Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu anggaran murni sebesar Rp. 198,910,000,- berubah anggaran menjadi sebesar Rp. 224,460,000,- atau mengalami kenaikan sebesar Rp 25,550,000,- hal ini dikarenakan rencana

anggaran untuk kegiatan gelar pengawasan 1 yang sebelumnya dilaksanakan di Hotel menjadi anggaran makan dan minum kantor hasil tindak lanjut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 Tanggal 22 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan. dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

7) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD anggaran murni sebesar Rp. 2,718,095,200,- berubah anggaran menjadi sebesar Rp 2,611,521,000,- atau mengalami penurunan sebesar Rp. 106,574,200,- hal ini dikarenakan implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 Tanggal 22 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan. dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1) Sub Kegiatan Pengadaan Mebel anggaran murni sebesar Rp. 187,650,000,- berubah anggaran menjadi sebesar Rp. 782,801,680,- atau mengalami perubahan sebesar Rp. 595,151,680,- hal ini dikarenakan rencana pembelian meja dan kursi kerja untuk CPNS sebanyak 21 orang dan CPPPK sebanyak 7 orang belum dianggarkan di APBD Murni.
2) Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya anggaran murni sebesar Rp. 266,277,800,- berubah anggaran menjadi sebesar Rp. 964,480,030,- atau mengalami perubahan sebesar Rp. 156,955,440,- hal ini dikarenakan rencana pembelian laptop, scanner, dan printer belum dianggarkan di APBD Murni.

f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat anggaran murni sebesar Rp. 17,760,000,- berubah anggaran menjadi sebesar Rp. 8,592,000,- atau mengalami kenaikan sebesar Rp. (2,148,000),- hal ini dikarenakan implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 Tanggal 22 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan. dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor anggaran murni sebesar Rp. 289,655,000,- berubah anggaran menjadi sebesar Rp. 673,528,500,- atau mengalami kenaikan sebesar Rp. 383,873,500,- hal ini dikarenakan rencana kebutuhan gaji 13 dan 14 Non ASN dan kebutuhan visualisasi kegiatan belum dianggarkan di APBD Murni.

g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas

jabatan, anggaran murni sebesar Rp. 278,768,800,- berubah anggaran menjadi sebesar Rp. 257,529,948,- atau mengalami perubahan sebesar Rp. 21,238,852,- hal ini dikarenakan untuk kendaraan operasional terbaru masih mendapatkan garansi pemeliharaan sehingga tidak terserap dan anggaran dialihkan untuk kegiatan lain.

2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan anggaran murni sebesar Rp. 643,627,600,- berubah anggaran menjadi sebesar Rp. 778,974,824,- atau mengalami kenaikan sebesar Rp. 135,347,224,- hal ini dikarenakan untuk kendaraan operasional Hiace dan Saber Pungli belum dianggarkan di Murni.
3) Sub Kegiatan Pemeliharaan peralatan dan mesin lainya anggaran murni sebesar Rp. 240,500,000,- berubah anggaran menjadi sebesar Rp. 266,400,000,- atau mengalami kenaikan sebesar Rp. 25,900,000,- hal ini dikarenakan rencana anggaran untuk kebutuhan pemeliharaan peralatan dan mesin di triwulan IV belum dianggarkan di APBD Murni.
4) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya anggaran murni sebesar Rp. 1,058,438,182,- berubah anggaran menjadi sebesar Rp. 841,765,000,- atau mengalami kenaikan sebesar Rp. 4,675,000,- hal ini dikarenakan implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 Tanggal 22 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan. dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

2. Program Penyelenggaran Pengawasan
   a. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal
      1) Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah anggaran murni sebesar Rp. 1,660,852,000,- berubah anggaran menjadi sebesar Rp. 23,129,400,- atau mengalami penurunan sebesar Rp. 1,637,722,600,- hal ini dikarenakan implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 Tanggal 22 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan. dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
      2) Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah anggaran murni sebesar Rp. 1,188,010,800,- berubah anggaran menjadi sebesar Rp. 983,045,000,- atau mengalami peurunan sebesar Rp. 204,965,800,- hal ini dikarenakan implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 Tanggal 22 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan. dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
      3) Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja anggaran murni sebesar Rp. 2,220,801,200,- berubah anggaran menjadi sebesar Rp. 1,474,878,000,- atau mengalami penurunan sebesar Rp.

745,923,200,- hal ini dikarenakan implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 Tanggal 22 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan. dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

4) Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan anggaran murni sebesar Rp. 3,081,453,200,- berubah anggaran menjadi sebesar Rp. 1,224,910,000,- atau mengalami penurunan sebesar Rp. 1,856,543,200,- hal ini dikarenakan implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 Tanggal 22 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan. dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
5) Sub Kegiatan Pengawasan Desa anggaran murni sebesar Rp. 1,116,124,000,- berubah anggaran menjadi sebesar Rp. 1,007,681,000,- atau mengalami kenaikan sebesar Rp. 108,443,000,- hal ini dikarenakan implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 Tanggal 22 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan. dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
6) Sub Kegiatan Kerjasama Pengawasan Internal anggaran murni sebesar Rp. 143,046,000,- berubah anggaran menjadi sebesar Rp. 128,600,000,- atau mengalami kenaikan sebesar Rp. 14,446,000,- hal ini dikarenakan implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 Tanggal 22 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan. dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
7) Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP anggaran murni sebesar Rp. 1,152,802,200,- berubah anggaran menjadi sebesar Rp. 857,373,000,- atau mengalami kenaikan sebesar Rp. 295,429,200,- hal ini dikarenakan implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 Tanggal 22 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan. dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

b. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

1) Sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara / Daerah anggaran murni sebesar Rp. 118,656,000,- berubah anggaran menjadi sebesar Rp. 91,512,000,- atau mengalami penurunan sebesar Rp. 27,144,000,- hal ini dikarenakan implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 Tanggal 22 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan
2) Sub Kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu anggaran murni sebesar Rp. 4,086,217,000,- berubah

anggaran menjadi sebesar Rp. 1,054,460,000,- atau mengalami penurunan sebesar Rp. 3,031,757,000,- hal ini dikarenakan rencana pendampingan BOSP yang semula dilakukan untuk 846 sekolah (SD dan SMP) berkurang menjadi sesuai dengan arahan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia.

3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi
   a. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
      1) Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Di Bidang Pengawasan anggaran murni sebesar Rp 1,180,065,200,- berubah anggaran menjadi sebesar Rp. 561,750,000,- atau mengalami penurunan sebesar Rp. 618,315,200,- hal ini dikarenakan implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 Tanggal 22 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan
   b. Kegiatan Pendampingan dan Asistensi
      1) Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah anggaran murni sebesar Rp. 3,369,007,200,- berubah anggaran menjadi sebesar Rp. 1,703,448,600,- atau mengalami penurunan sebesar Rp. 1,665,558,600,- hal ini dikarenakan implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 Tanggal 22 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan
      2) Sub Kegiatan Pendampingan , Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi anggaran murni sebesar Rp. 158,610,800,- berubah anggaran menjadi sebesar Rp. 291,480,000,- atau mengalami kenaikan sebesar Rp. 28,593,800,- hal ini dikarenakan rencana anggaran untuk kegiatan Reformasi Birokrasi ex-ante belum dianggarkan di APBD Murni.
      3) Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi anggaran murni sebesar Rp. 321,336,800,- berubah anggaran menjadi sebesar Rp. 765,168,800,- atau mengalami kenaikan sebesar Rp. 443,832,000,- hal ini dikarenakan rencana anggaran untuk kegiatan Survey Penilaian Integritas belum dianggarkan di APBD Murni.
      4) Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas anggaran murni sebesar Rp. 1,398,375,000,- berubah anggaran menjadi sebesar Rp. 908,493,000,- atau mengalami penurunan sebesar Rp. 489,882,000,- hal ini dikarenakan implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 Tanggal 22 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan program dan kegiatan lnspektorat Daerah Kabupaten Tangerang selama ini didasarkan pada arahan dan pedoman kebijakan program pengawasan dari Kementerian Dalam Negeri dan kebijakan program pengawasan dari lnspektorat provinsi Banten. Sehingga, dikarenakan tugas pokok lnspektorat dalam bidang pengawasan, secara spesifik lnspektorat Daerah tidak menampung usulan program dan kegiatan dari Masyarakat.

Namun seiring dengan tingginya tuntutan penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean governance*) dari masyarakat dan pemangku kepentingan terhadap birokrasi di lndonesia maka peran lnspektorat Daerah menjadi sangat penting. Selain itu, kemajuan teknologi yang semakin pesat dan maraknya penggunaan media sosial, nilai-nilai tranparansi dalam tata kelola pemerintahan menjadi hal yang wajib dipenuhi.

Masyarakat menuntut pertanggungjawaban atas tata kelola pemerintahan pemerintahan pada umumnya, dan pengelolaan keuangan pada khususnya dapat diakses oleh masyarakat untuk ikut berpartisipasi melakukan pengawasan. Akibatnya, ketika terjadi indikasi adanya penyelewengan atas pengelolaan keuangan masyarakat akan langsung bereraksi dengan melaporkan kepada pihak-pihak yang dianggap berkompeten dalam bidang pengawasan. Disinilah peran lnspektorat dalam mengakomodir pengaduan dan aspirasi yang datang dari masyarakat, baik yang melalui Bupati, lnspektorat Daerah secara langsung maupun melalui Pihak-pihak eksternal, seperti Aparat Penegak Hukum (APH).

Pengaduan dari masyarakat akan ditindaklanjuti dengan melakukan verifikasi awal tentang kebenaran informasi yang dilaporkan untuk kemudian ditindaklanjuti dengan pelaksanaan pemeriksaan dilapangan. Disini lnspektorat Daerah Kabupaten Tangerang membuka seluas-luasnya setiap pengaduan masyarakat asalkan sesuai dengan peraturan perundangan dan prosedur yang sesuai.

Penelahaan usulan program dan kegiatan masyarakat diutamakan yang merupakan usulan-usulan yang berasal dari aspirasi masyarakat Kabupaten Tangerang. Khusus untuk bidang pengawasan, usulan-usulan tersebut tidak dimunculkan/tidak ada dan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 5
Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2025

NO	PROGRAM	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6
	TIDAK ADA USULAN				

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja (RENJA) merupakan acuan setiap perangkat daerah (PD) dalam mengoperasionalkan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi. Dengan rencana kerja yang terukur dan didukung oleh pendanaan, maka menjadi suatu instrumen dan indikator yang digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah.

Penyusunan RENJA berpedoman pada renstra lnspektorat Kabupaten Tangerang dan mengacu pada rencana kerja pemerintah daerah (RKPD). Penyusunan RENJA bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD. Rencana Kerja lnspektorat merupakan bagian yang utuh dari rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan rencana strategis (RENSTRA) lnspektorat. Keduanya merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah dan peraturan menteri dalam negeri nomor 28 tahun 2009 tentang perubahan atas peraturan menteri dalam negeri nomor 23 tahun 2007 tentang pedoman tata cara pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dengan demikian program dan kegiatan pembangunan yang ada pada dokumen perencanaan diatur secara rinci dalam rencana kerja (RENJA).

Dalam rangka mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Inspektorat Kabupaten Tangerang, serta untuk melaksanakan strategi dan kebijakan melalui beberapa program dan kegiatan. Adapun Program dan Kegiatan beserta anggaran yang diusulkan perubahan di tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan usulan anggaran Rp 44,454,721,617,- sebagai penanggungjawabnya yaitu Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan Inspektorat Kabupaten Tangerang yang terdiri dari 8 kegiatan dan 34 Sub Kegiatan sebagaimana tergambar pada tabel 3.1 berikut ini :

Tabel 3. 1
Usulan Perubahan Anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Inspektorat Kabupaten Tangerang Tahun 2025

NO	KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN YANG DIUSULKAN (Rp.) Tahun 2025	PENANGGUNG JAWAB
A	**6.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**44,454,721,617**	
1	**6.01.01.2.01**	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**468,480,000**	**KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN**
1)	6.01.01.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	224,999,000	

NO	KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN YANG DIUSULKAN (Rp.) Tahun 2025	PENANGGUNG JAWAB
2)	6.01.01.2.01.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	10,950,000	
3)	6.01.01.2.01.03	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	32,850,000	
4)	6.01.01.2.01.04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	15,604,000	
5)	6.01.01.2.01.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	46,812,000	
6)	6.01.01.2.01.06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	76,113,000	
7)	6.01.01.2.01.07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	61,152,000	
2	**6.01.01.2.02**	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**30,542,083,420**	**KEPALA SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN**
8)	6.01.01.2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	30,517,677,420	
9)	6.01.01.2.02.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	14,207,000	
10)	6.01.01.2.02.07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	10,199,000	
3	**6.01.01.2.03**	**Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**15,483,000**	
11)	6.01.01.2.03.01	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2,920,000	
12)	6.01.01.2.03.05	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	5,840,000	
13)	6.01.01.2.03.06	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6,723,000	
4	**6.01.01.2.05**	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**1,756,230,800**	
14)	6.01.01.2.05.02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	91,440,000	
15)	6.01.01.2.05.09	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1,664,790,800	
5	**6.01.01.2.06**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**6,878,253,500**	
16)	6.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	21,493,500	
17)	6.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1,272,374,000	
18)	6.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	106,793,900	
19)	6.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	291,907,100	
20)	6.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	196,748,000	
21)	6.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10,000,000	
22)	6.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	198,910,000	
23)	6.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4,780,027,000	
6	**6.01.01.2.07**	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**1,904,237,150**	
24)	6.01.01.2.07.05	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	782,801,680	

NO	KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN YANG DIUSULKAN (Rp.) Tahun 2025	PENANGGUNG JAWAB
25)	6.01.01.2.07.06	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1,121,435,470	
7	**6.01.01.2.08**	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**703,535,500**	
26)	6.01.01.2.08.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8,592,000	
27)	6.01.01.2.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	694,943,500	
8	**6.01.01.2.09**	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**2,186,418,247**	
28)	6.01.01.2.09.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	257,529,948	
39)	6.01.01.2.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	772,574,824	
30)	6.01.01.2.09.05	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	7,000,000	
31)	6.01.01.2.09.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan peralatan dan mesin lainya	208,550,000	
32)	6.01.01.2.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	837,090,000	
33)	6.01.01.2.09.10	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	103,673,475	

Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdapat 8 Kegiatan dan 27 Sub Kegiatan yang berubah, antara lain:

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
   2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
   3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
   4) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
   5) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
   6) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
   7) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
   3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
    1) Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang
    2) Milik Daerah SKPD
    3) Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
    4) Sub Kegiatan Penataan Barang Milik Daerah pada SKPD
4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
    1) Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
    2) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    3) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
    4) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penaaggandaan
    5) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
    6) Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
    7) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
    1) Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
    2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
    2) Sub Kegiatan Pemeliharaan peralatan dan mesin lainya
    3) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. Program Penyelenggaraan Pengawasan dengan usulan anggaran Rp. 8,817,904,200,- sebagai penanggungjawabnya yaitu Inspektur Pembantu Wilayah I, Inspektur Pembantu Wilayah II, Inspektur Pembantu Wilayah III, Inspektur Pembantu Wilayah IV, Inspektur Pembantu Wilayah V, dan Kepala Sub Bagian Analisis dan Evaluasi Inspektorat Kabupaten Tangerang yang terdiri dari 2 kegiatan dan 9 Sub Kegiatan sebagaimana tergambar pada tabel 3.2 berikut ini:

Tabel 3. 2
Usulan Perubahan Anggaran Program Penyelenggaraan Pengawasan Inspektorat Kabupaten Tangerang Tahun 2025

NO	KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN YANG DIUSULKAN (Rp.) Tahun 2025	PENANGGUNG JAWAB
B	**06.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**8,817,904,200**	
9	**6.01.02.1.01**	**Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	**7,092,400,200**	
35)	6.01.02.1.01.01	Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	199,848,200	**INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH I**
36)	6.01.02.1.01.02	Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	1,138,255,000	**INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH III**
37)	6.01.02.1.01.03	Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja	1,982,970,000	**INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH II**
38)	6.01.02.1.01.04	Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan	1,541,380,000	**INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH II**
39)	6.01.02.1.01.05	Sub Kegiatan Pengawasan Desa	1,484,146,000	**INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH IV**
40)	6.01.02.1.01.06	Sub Kegiatan Kerjasama Pengawasan Internal	175,948,000	**INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH IV**
41)	6.01.02.1.01.07	Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	569,853,000	**KEPALA SUB BAGIAN ANALISIS DAN EVALUASI**
10	**6.01.02.1.02**	**Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**	**1,725,504,000**	
42)	6.01.02.1.02.01	Sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara / Daerah	117,376,000	**INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH V**
43)	6.01.02.1.02.02	Sub Kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	1,608,128,000	**INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH I**

3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi dengan usulan anggaran Rp. 4,524,722,200,- sebagai penanggungjawabnya yaitu Inspektur Pembantu Wilayah III, Inspektur Pembantu Wilayah IV, dan Inspektur Pembantu Wilayah V Inspektorat Kabupaten Tangerang yang terdiri dari 2 kegiatan dan 5 Sub Kegiatan sebagaimana tergambar pada tabel 3.3 berikut ini :

Tabel 3. 3
Usulan Perubahan Anggaran Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi Inspektorat Kabupaten Tangerang Tahun 2025

NO	KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN YANG DIUSULKAN (Rp.) Tahun 2025	PENANGGUNG JAWAB
C	**06.01.03**	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	**4,524,722,200**	
11	**06.01.03.1.01**	**Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis DI Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**	**633,863,600**	
44)	06.01.03.1.01.01	Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Di Bidang Pengawasan	633,863,600	**INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH III**
12	**06.01.03.1.02**	**Kegiatan Pendampingan dan Asistensi**	**3,890,858,600**	
45)	06.01.03.2.02.01	Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	1,836,760,600	**INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH V**
46)	06.01.03.2.02.02	Sub Kegiatan Pendampingan , Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	391,120,000	**INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH V**
47)	06.01.03.2.02.03	Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	736,575,000	**INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH V**
48)	06.01.03.2.02.04	Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	926,403,000	**INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH IV**

Tabel 3.4 Rencana Kegiatan dan Anggaran Perubahan Inspektorat Tahun Anggaran 2025

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SATUAN INDIKATOR	TARGET KINERJA 2025		TARGET ANGGARAN 2025 (Rp.)				
				Murni	Perubahan	Murni	Efisiensi	Perubahan	Selisih Terhadap Murni	Selisih terhadap Efisiensi
	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN									
	INSPEKTORAT DAERAH									
A	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Ketercapaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persen**	**100.00 %**	**100.00%**	**44,512,571,617**	**41,675,503,317**	**42,555,100,038**	**(1,957,471,579)**	**870,246,721**
1	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Dokumen**	**0**	**5**	**468,480,000**	**401,758,500**	**401,758,500**	**(66,721,500)**	**-**
1)	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	5	224,999,000	202,215,500	202,215,500	(22,783,500)	-
2)	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1	10,950,000	8,030,000	8,030,000	(2,920,000)	-
3)	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	2	2	32,850,000	24,455,000	24,455,000	(8,395,000)	-
4)	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	1	15,604,000	11,252,000	11,252,000	(4,352,000)	-
5)	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	2	2	46,812,000	34,837,000	34,837,000	(11,975,000)	-
6)	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Laporan	1	1	76,113,000	75,397,000	75,397,000	(716,000)	-

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SATUAN INDIKATOR	TARGET KINERJA 2025		TARGET ANGGARAN 2025 (Rp.)				
				Murni	Perubahan	Murni	Efisiensi	Perubahan	Selisih Terhadap Murni	Selisih terhadap Efisiensi
	Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
7)	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	12	12	61,152,000	45,572,000	45,572,000	(15,580,000)	-
2	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Keuangan**	**Dokumen**	**2**	**2**	**30,542,083,420**	**30,535,527,420**	**31,402,311,581**	**860,228,161**	**866,784,161**
8)	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	90	111	30,517,677,420	30,517,677,420	31,384,461,581	866,784,161	866,784,161
9)	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1	14,207,000	10,564,000	10,564,000	(3,643,000)	-
10)	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Laporan	2	2	10,199,000	7,286,000	7,286,000	(2,913,000)	-
3	**Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah laporan Barang Milik Daerah**	**Dokumen**	**1**	**1**	**15,483,000**	**11,590,000**	**11,590,000**	**(3,893,000)**	**-**
11)	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	2	2	2,920,000	2,190,000	2,190,000	(730,000)	-
12)	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	2	2	5,840,000	4,380,000	4,380,000	(1,460,000)	-

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SATUAN INDIKATOR	TARGET KINERJA 2025		TARGET ANGGARAN 2025 (Rp.)				
				Murni	Perubahan	Murni	Efisiensi	Perubahan	Selisih Terhadap Murni	Selisih terhadap Efisiensi
13)	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	1	6,723,000	5,020,000	5,020,000	(1,703,000)	-
4	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah pegawai yang difasilitas**	**Orang**	**120**	**141**	**1,756,230,800**	**1,294,134,000**	**1,218,189,000**	**(538,041,800)**	**(75,945,000)**
14)	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	3	3	91,440,000	91,440,000	91,440,000	-	-
15)	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pegawai	100	141	1,664,790,800	1,202,694,000	1,126,749,000	(538,041,800)	(75,945,000)
5	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jenis**	**7**	**7**	**6,878,253,500**	**4,585,290,500**	**4,838,653,500**	**(2,039,600,000)**	**253,363,000**
16)	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5	5	21,493,500	21,493,500	51,493,500	30,000,000	30,000,000
17)	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	20	13	1,272,374,000	1,272,374,000	1,396,489,000	124,115,000	124,115,000
18)	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	50	50	106,793,900	106,793,900	106,793,900	-	-
19)	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	30	30	291,907,100	284,032,100	284,032,100	(7,875,000)	-
20)	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	20	20	196,748,000	154,580,000	154,580,000	(42,168,000)	-
21)	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	12	10,000,000	9,284,000	9,284,000	(716,000)	-
22)	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4	4	198,910,000	198,910,000	224,460,000	25,550,000	25,550,000

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SATUAN INDIKATOR	TARGET KINERJA 2025		TARGET ANGGARAN 2025 (Rp.)				
				Murni	Perubahan	Murni	Efisiensi	Perubahan	Selisih Terhadap Murni	Selisih terhadap Efisiensi
23)	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	4	4,780,027,000	2,537,823,000	2,611,521,000	(2,168,506,000)	73,698,000
6	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah barang milik daerah**	**Unit**	**8**	**8**	**1,904,237,150**	**1,904,237,150**	**1,747,281,710**	**(156,955,440)**	**(156,955,440)**
24)	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	4	4	782,801,680	782,801,680	782,801,680	-	-
25)	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	18	7	1,121,435,470	1,121,435,470	964,480,030	(156,955,440)	(156,955,440)
7	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya Jasa Penunjang**	**Jenis**	**3**	**3**	**703,535,500**	**698,697,500**	**679,972,500**	**(23,563,000)**	**(18,725,000)**
26)	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	8,592,000	6,444,000	6,444,000	(2,148,000)	-
27)	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	694,943,500	692,253,500	673,528,500	(21,415,000)	(18,725,000)
8	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Jenis Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	**Jenis**	**30**	**30**	**2,244,268,247**	**2,244,268,247**	**2,255,343,247**	**11,075,000**	**1,725,000**
28)	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	7	7	257,529,948	257,529,948	257,529,948	-	-
29)	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	30	30	772,574,824	772,574,824	778,974,824	6,400,000	6,400,000

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SATUAN INDIKATOR	TARGET KINERJA 2025		TARGET ANGGARAN 2025 (Rp.)				
				Murni	Perubahan	Murni	Efisiensi	Perubahan	Selisih Terhadap Murni	Selisih terhadap Efisiensi
30)	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	5	5	7,000,000	7,000,000	7,000,000	-	-
31)	Sub Kegiatan Pemeliharaan peralatan dan mesin lainya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	60	60	266,400,000	266,400,000	266,400,000	-	-
32)	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	837,090,000	837,090,000	841,765,000	4,675,000	(4,675,000)
33)	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	103,673,475	103,673,475	103,673,475	-	-
B	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**Prosentase OPD yang Melaksanakan 3E (Efektif, Efisien, Ekonomis)**	**Persen**	**66,07**	**66,07**	**8,817,904,200**	**6,469,982,400**	**6,845,588,400**	**-1,972,315,800**	**375,606,000**
9	**Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	**Prosentase Laporan Temuan Hasil Pengawasan yang ditindaklanjuti**	**Laporan**	**2244**	**2244**	**7,092,400,200**	**5,324,010,400**	**5,699,616,400**	**-1,392,783,800**	**375,606,000**
34)	Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan	11	1	199,848,200	149,255,400	23,129,400	(176,718,800)	(126,126,000)
35)	Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan	115	122	1,138,255,000	889,444,000	983,045,000	(155,210,000)	93,601,000
36)	Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Laporan	381	257	1,982,970,000	1,436,232,000	1,474,878,000	(508,092,000)	38,646,000
37)	Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Laporan	342	213	1,541,380,000	1,224,910,000	1,224,910,000	(316,470,000)	-
38)	Sub Kegiatan Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Laporan	738	248	1,484,146,000	1,007,681,000	1,007,681,000	(476,465,000)	-
39)	Sub Kegiatan Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Kesepakatan	3	2	175,948,000	128,600,000	128,600,000	(47,348,000)	-
40)	Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi	Dokumen	1153	1154	569,853,000	487,888,000	857,373,000	287,520,000	369,485,000

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SATUAN INDIKATOR	TARGET KINERJA 2025		TARGET ANGGARAN 2025 (Rp.)				
				Murni	Perubahan	Murni	Efisiensi	Perubahan	Selisih Terhadap Murni	Selisih terhadap Efisiensi
	Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP								
10	**Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**	**Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**	**Laporan**	**74**	**74**	**1,725,504,000**	**1,145,972,000**	**1,145,972,000**	**- 579,532,000**	**-**
41)	Sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara / Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Laporan	85	4	117,376,000	91,512,000	91,512,000	(25,864,000)	-
42)	Sub Kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Laporan	1758	685	1,608,128,000	1,054,460,000	1,054,460,000	(553,668,000)	-
C	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	**Prosentase Perangkat Daerah yang Memenuhi Kriteria Menuju Zona Integritas**	**Persen**	**100.00 %**	**100.00%**	**4,524,722,200**	**3,795,486,600**	**4,230,340,400**	**- 294,381,800**	**434,853,800**
11	**Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis DI Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**	**Jumlah Rumusan Kebijakan yang dihasilkan**	**Dokumen**	**15**	**15**	**633,863,600**	**527,295,000**	**561,750,000**	**- 72,113,600**	**34,455,000**
43)	Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Rekomendasi	13	8	633,863,600	527,295,000	561,750,000	(72,113,600)	34,455,000
12	**Kegiatan Pendampingan dan Asistensi**	**Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi**	**Perangkat Daerah**	**63**	**63**	**3,890,858,600**	**3,268,191,600**	**3,668,590,400**	**- 222,268,200**	**400,398,800**
44)	Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Perangkat Daerah	242	60	1,836,760,600	1,703,448,600	1,703,448,600	(133,312,000)	-
45)	Sub Kegiatan Pendampingan , Asistensi,	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi,	Perangkat Daerah	10	4	391,120,000	291,480,000	291,480,000	(99,640,000)	-

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SATUAN INDIKATOR	TARGET KINERJA 2025		TARGET ANGGARAN 2025 (Rp.)				
				Murni	Perubahan	Murni	Efisiensi	Perubahan	Selisih Terhadap Murni	Selisih terhadap Efisiensi
	Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi								
46)	Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Perangkat Daerah	7	13	736,575,000	364,770,000	765,168,800	28,593,800	400,398,800
47)	Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Perangkat Daerah	132	24	926,403,000	908,493,000	908,493,000	(17,910,000)	-
JUMLAH						**57,855,198,017**	**51,940,972,317**	**53,631,028,838**	**- 4,224,169,179**	**1,680,706,521**

BAB IV
PENUTUP

a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.

Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Inspektorat Tahun 2025 merupakan pelaksanaan rencana strategis tahun pertama periode Renstra 2024-2026. Program dan kegiatan yang direncanakan merupakan prioritas dalam rangka mencapai visi dan misi Inspektorat dan mendukung tercapainya visi dan misi rencana pembangunan daerah 2024-2026.

Alokasi Perubahan Anggaran Indikatif pada tahun 2025 yang diperuntukan membiayai seluruh Program Kegiatan, Kegiatan dan Sub kegiatan adalah sebesar Rp. 53,631,028,838,- (Lima Puluh Tiga Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Satu Juta Dua Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah).

Sebagai input bagi para pemangku kebijakan dalam hal pengalokasian anggaran pemerintah daerah bahwa dalam rangka peningkatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan daerah, masing-masing pemerintah daerah agar mengalokasikan minimal 0,5% dari Total Belanja Daerah di luar alokasi belanja gaji dan tunjangan Pegawai dan meningkat setiap tahunnya secara proporsional untuk anggaran lnspektorat Kabupaten/Kota dan Provinsi. Hal ini sejalan dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 700.1.1/8737/SJ Tanggal 09 Desember 2022 perihal Penguatan Inspektorat Daerah Dalam Pengawasan Pemerintah Daerah, disampingitu jugaperlu diantisipasi dengan diberlakukannya Undang-Undang tentang Desa yang salah satu implementasinya akan ada bantuan keuangan untuk setiap desa yang nilainya cukup besar, dan ini memerlukankontrol, agar penyimpangan, penyelewengan, dapatdiminimalisir sehingga tujuan mewujudkan pemerintah yang bersih dapat tercapai untuk berbagai level pemerintahan.

b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.

Dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tangerang, Perangkat Daerah wajib menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Pelaksanaan kegiatan, baik dalam kerangka regulasi maupun dalam kerangka investasi pemerintah daerah dan pelayanan umum, mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik di antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing Perangkat Daerah serta pembagian urusan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka mewujudkan keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan yang telah diprogramkan, telah dilaksanakan proses musyawarah antar pelaku pembangunan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan atau Musrenbang, seperti Musrenbang Daerah Kabupaten/Kota, Rapat Koordinasi Pusat (Rakorpus), Musrenbang Provinsi, dan Musrenbang Nasional (Musrenbangnas). RKPD Tahun 2025

merupakan acuan bagi Perangkat Daerah, dan Pemerintah Kabupaten/Kota maupun masyarakat termasuk dunia usaha sehingga dapat tercapai sinergi dalam pelaksanaan program pembangunan.

Sehubungan dengan itu, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Tangerang sebagai berikut:

1) Melaksanakan program-program Rencana Kerja Perubahan Tahun Anggaran 2025 dengan sebaik-baiknya;
2) Rencana Kerja Murni Tahun 2025 menjadi acuan dan pedoman bagi Inspektorat dalam menyusun kebijakan publik, baik yang berupa kerangka regulasi maupun kerangka investasi pemerintah daerah dan pelayanan umum, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2025;
3) Untuk mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan program dalam rangka koordinasi perencanaan, maka Inspektorat perlu menyesuaikan Rencana Kerja (Renja) Perubahan sesuai dengan pagu Tahun 2025 sebagai berikut:
   a) Uraian penggunaan dana APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tertuang dalam Bab-III, yang merupakan kegiatan untuk mencapai prioritas di bidang pengawasan dan prioritas pembangunan daerah yang berupa kerangka regulasi sesuai dengan kewenangannya dalam bentuk Perda;
   b) Uraian rencana penggunaan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025, yang merupakan kegiatan untuk mencapai prioritas pembangunan daerah yang berupa kerangka pelayanan umum Inspektorat sesuai dengan kewenangannya;
   c) Uraian sebagaimana yang dimaksud butir (b) di atas perlu menguraikan kewenangan pengguna anggaran yang bersangkutan, dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintah daerah, maupun tugas yang berkaitan dengan pencapaian prioritas/program/kegiatan pemerintah dalam rangka dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
4) Mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan setiap program dalam rangka koordinasi perencanaan.
5) Pelaksanaan rencana program/kegiatan yang tertuang dalam RKPD ini wajib mengikuti prinsip prinsip pengarusutamaan yaitu: (1) pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan; (2) pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik; dan (3) pengarusutamaan gender.
6) Pada akhir tahun anggaran 2025, Inspektorat wajib melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan, kesesuaiannya dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD, serta kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan APBD dan peraturan-peraturan lainnya;
7) Untuk menjaga efektivitas pelaksanaan program, Inspektorat wajib melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan, melakukan tindakan koreksi yang diperlukan, dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala 3 bulan (triwulan) kepada Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindaklanjut program dan kegiatan Inspektorat Kabupaten Tangerang pada tahun 2025 menetapkan 3 Program, 12 Kegiatan, dan 47 Sub Kegiatan. Dengan demikian besar harapan kami agar alokasi anggaran

untuk lnspektorat Kabupaten Tangerang mendapat prioritas dalam kebijakan pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bagi implementasi program peningkatan pengawasan Akuntabilitas Aparatur Negara sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dalam hal penyelenggaraan pengawasan/audit atas instansi pemerintahan dan aparatur pemerintah, selain itu alokasi anggaran yang di terima akan di prioritaskan untuk meningkatkan kapasitas tenaga pengawas dan pemeriksa agar kualitas pengawasan serta penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan dan pemeriksaan/audit mengalami peningkatan.

Rencana ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi Inspektorat Kabupaten Tangerang dalam menjalankan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta sebagai acuan dalam menyusun program/kegiatan perangkat daerah tahun 2025. Keberhasilan pelaksanaan Renja Perubahan Inspektorat Kabupaten Tangerang tahun 2025 tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab seluruh pegawai Inspektorat Kabupaten Tangerang.

4. Badan Pendapatan Daerah

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Renja Perubahan Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025 adalah Dokumen Perencanaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk periode 1 (satu) Tahun pada APBD Perubahan. Renja Perubahan ini memuat program dan kegiatan, lokasi kegiatan, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, indikator kinerja, kelompok sasaran serta pagu indikatif perubahan dan prakiraan maju Tahun 2026.

Renja Perubahan Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025 memiliki fungsi dan peran yang strategis dalam sistem perencanaan pembangunan daerah karena Renja pada dasarnya adalah pelaksanaan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPD) Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026.

Penyusunan Renja Perubahan Badan Pendapatan Daerah mengacu pada Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Tahun 2024-2026 (Renstra OPD), hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, permasalahan yang dihadapi, dan usulan program dan kegiatan yang mengikat dan yang berasal dari masyarakat. Rencana Kerja ini disusun menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Lebih lanjut, Rencana kerja merupakan penjabaran operasional dari dokumen Rencana strategis OPD yang telah disusun melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah. Rencana kerja menjadi perangkat penting dalam menjelaskan serangkaian tindakan yang bersifat operasional yang perlu dilakukan dalam jangka pendek untuk mencapai tujuan dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra OPD.

Rencana kerja merupakan instrument penting bagi OPD dalam mengartikulasikan secara langsung tugas dan perannya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan isu-isu strategis dan pendekatan dalammemecahkan masalah. Rencana kerja OPD secara sistematis menggambarkan apa yang seharusnya dilakukan dan bagaimana mencapainya, sehingga memudahkan dalam mengukur target capaian kinerja dalam setiap tahapan pembangunan daerah. Melalui rencana kerja, masing-masing OPD dan pemangku kepentinganlain dapat menetapkan alternatif program atau kegiatan yang secara langsung berkaitandengan pemenuhan

kebutuhan pelayanan dan strategi intervensi yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Badan Pendapatan Daerah sebagai salah satu OPD di Pemerintah Kabupaten Tangerang juga mempunyai kewajiban menyusun rencana

kerja sebagai dokumen perencanaan pembangunan Pemerintah Daerah sekaligus sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan pada tahun 2025. Penyusunan rencana kerja Perubahan Badan Pendapatan Daerah harus mempertimbangkan keintegrasian, keselarasan dan sinergitas dengan berbagai dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Ini perlu dilakukan agar tujuan dan sasaran pembangunan yang dirumuskan dapat lebih terarah, terpadu, dan saling mendukung.

Rencana kerja perubahan Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025, merupakan turunandari Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Tahun 2024 - 2026. RENJA Perubahan Tahun 2025 merupakan tahun kedua dari Renstra. Terdapat 2 (dua) program pada Tahun 2025, yaitu program pengelolaan pendapatan daerah dan program penunjang urusan pemerintahan daerahkabupaten/kota.

Gambar 1.1
Hubungan Renja dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

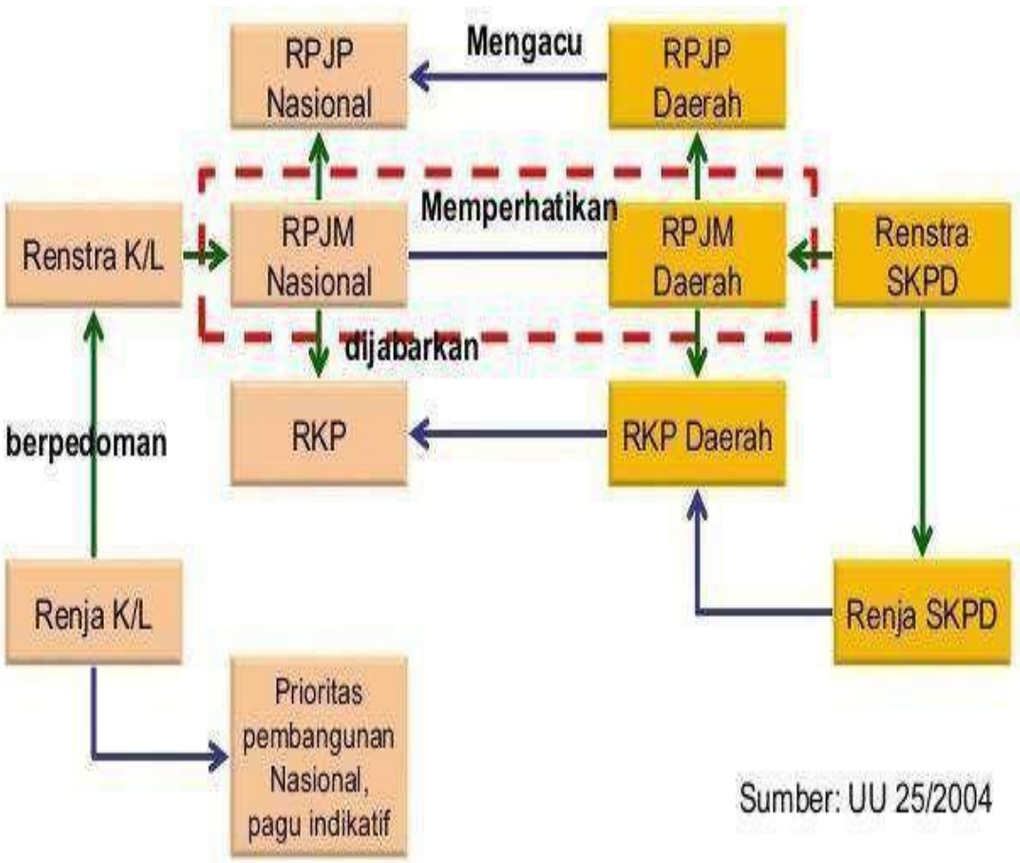

1.2 Landasan Hukum

Rencana Kerja Perubahan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2025 ini disusun dengan mengacu kepada :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Tangerang;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tangerang tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 30 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang
17. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 39 tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah tahun 2024-2026;
18. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 20 tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 adalah sebagai dokumen acuan dalam pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan urusan keuangan untuk kurun waktu satu tahun (APBD Perubahan 2025) secara terencana, terarah, terpadu dan berkesinambungan sesuai dengan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026.

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Evaluasi Capaian kinerja Tahun 2025 tahun berjalan
2. Kerangka Pendanaan Perkiraan Maju Tahun 2026

1.4 Sistematika Penulisan

Adapun Sistematika Penulisan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini mencakup tentang latar belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan penyusunan Renja Perubahan Tahun 2025 dan Sistematika Penulisan.

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN

Bab ini mencakup tentang Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini mencakup tentang rencana kerja dan anggaran perubahan tahun 2025.

BAB V PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Berkenaan

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi Pemerintah Kabupaten Tangerang.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Tingkat capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:

Persentase	Tingkat Capaian Kinerja	Kode Warna (RGB)
> 100%	Melebihi Target	0 0 255
= 100%	Tercapai / Sesuai Target	0 128 0
< 100%	Tidak Tercapai	255 0 0

Penilaian capaian kinerja tersebut, ditandai dengan skala pengukuran ordinal evaluasi kinerja yang dapat dimaknai sebagai berikut:

1. **Melebihi Target**
   Untuk capaian kinerja diatas 100,00% (>100,00%) ditandai dengan warna biru.
2. **Tercapai / Sesuai Target**
   Untuk capaian kinerja 100,00% (=100,00%) ditandai dengan warna hijau.
3. **Tidak Tercapai**
   Untuk capaian kinerja dibawah 100,00% (<100,00%) ditandai dengan warna merah.

Predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja dengan pendekatan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:

Predikat	Nilai Angka	Interpretasi	Kode Warna (RGB)
AA	> 100	**Sangat Memuaskan,**	0 0 255
AA	> 90 - 100		0 128 0
A	> 80 – 90	**Memuaskan,** Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel	50 205 50
BB	> 70 – 80	**Sangat Baik,** Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.	173 255 47
B	> 60 – 70	**Baik,** Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan.	255 255 0
CC	> 50 – 60	**Cukup (Memadai),** Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar.	255 215 0
C	> 30 – 50	**Kurang,** Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar.	255 140 0
D	0 – 30	**Sangat Kurang,** Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar.	255 0 0

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi warna (skala persentase) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

1. **Sangat Memuaskan**
   Untuk capaian kinerja di atas 100,00% (>100,00%) ditandai dengan warna biru.
   Untuk capaian kinerja lebih dari 90,00% sampai dengan 100,00% (>90,00% - 100,00%) ditandai dengan warna hijau.
2. **Memuaskan**
   Untuk capaian kinerja lebih dari 80,00% sampai dengan 90,00% (>80,00% - 90,00%) ditandai dengan warna hijau daun.
3. **Sangat Baik**
   Untuk capaian kinerja lebih dari 70,00% sampai dengan 80,00% (>70,00% - 80,00%) ditandai dengan warna hijau muda.

4. Baik

Untuk capaian kinerja lebih dari 60,00% sampai dengan 70,00% (>60,00% - 70,00%) ditandai dengan warna kuning.

5. Cukup (Memadai)

Untuk capaian kinerja lebih dari 50,00% sampai dengan 60,00% (>50,00% - 60,00%) ditandai dengan warna jingga muda.

6. Kurang

Untuk capaian kinerja lebih dari 30,00% sampai dengan 50,00% (>30,00% - 50,00%) ditandai dengan warna jingga.

7. Sangat Kurang

Untuk capaian kinerja dari 0,00% sampai dengan 30,00% (0,00 - 30,00%) ditandai dengan warna merah.

2.1.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Kinerja Tahun 2025

Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Kinerja pada tahun 2025 dapat kami sajikan sampai dengan 30 Juni 2025.

Badan Pendapatan Daerah pada Tahun Anggaran 2025 mempunyai 2 program, 8 kegiatan dan 38 sub kegiatan, dengan Anggaran sebesar Rp.121.681.951.873,- Adapun Rincian Anggaran Belanja untuk Tahun 2025 pada Badan Pendapatan Daerah dapat dilihat dibawah ini:

Tabel. 2.1.1
Program dan Anggaran Tahun 2025

No	PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN	ANGGARAN
1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1	10.932.699.350
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7	110.749.252.523
	Jumlah	8	121.681.951.873

2.1.2 Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Kinerja Tahun 2025

Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Kinerja pada tahun 2025 dapat kami sajikan sampai dengan 30 Juni 2025.

Badan Pendapatan Daerah pada Tahun Anggaran 2025 mempunyai 2 program, 8 kegiatan dan 38 sub kegiatan, dengan Anggaran sebesar Rp.121.681.951.873,- Adapun Rincian Anggaran Belanja untuk Tahun 2025 pada Badan Pendapatan Daerah dapat dilihat dibawah ini:

Tabel. 2.1.1
Program dan Anggaran Tahun 2025

No	PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN	ANGGARAN
1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1	10.932.699.350
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7	110.749.252.523
	Jumlah	8	121.681.951.873

Tabel. 2.1.2
Penyerapan Anggaran Program per Sasaran
Bapenda Kabupaten Tangerang
s/d 30 Juni 2025

SASARAN / PROGRAM		Anggaran Program		
		Pagu (Rp)	Penyerapan (Rp)	Capaian (%)
1.	**Meningkatnya Rasio Kemandirian Fiskal Daerah**	**10.932.699.350**	**3.975.271.900**	**36,36**
1.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	10.932.699.350	3.975.271.900	36,36
2.	**Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah**	**110.749.252.523**	**45.149.646.399**	**40,77**
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	110.749.252.523	45.149.646.399	40,77

No.	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	PENYERAPAN ANGGARAN		SISA
			Rp	%	
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**110.749.252.523**	**45.149.646.399**	**40,77**	**65.599.606.399**
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	350.384.440	54.259.000	15,49	296.125.440
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	94.656.436.031	36.319.115.764	38,36	58.337.320.267
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	17.403.000	4.000.000	22,98	13.403.000
1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	400.896.000	185.110.000	46,17	215.786.000
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.668.023.820	3.321.468.891	71,15	1.346.554.929
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah	6.856.159.556	3.251.656.216	47,43	3.604.503.340
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.785.354.676	2.014.036.528	53,21	1.771.318.148
2	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**10.932.699.350**	**3.975.271.900**	**36,36**	**6.957.427.450**
2.1	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	10.932.699.350	3.975.271.900	36,36	6.957.427.450

Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Bapenda Tahun 2025

Dari penelahaan terhadap Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2044-2026, keterlibatan dan peran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang terdapat pada **Misi 4 (keempat)** *"Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik, Demokratis dan partisipatif".*

Tujuan , Sasaran dan Indikator
Badan Pendapatan Daerah Tahun 2024-2026

	MISI	TUJUAN RPJMD	INDIKATOR TUJUAN RPJMD	SASARAN RPJMD	INDIKATOR SASARAN RPJMD	TUJUAN OPD	INDIKATOR TUJUAN OPD	SASARAN OPD	INDIKATOR SASARAN OPD
4	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik, Demokratis dan partisipatif	Meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah	Indeks reformasi birokrasi	Meningkatnya kinerja Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Nilai AKIP	1. Meningkatkan Tata kelola pemerintahan yang akuntable dan transparan bidang pendapatan daerah	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	Meningkatnya rasio kemandirian keuangan daerah	Meningkatnya rasio kemandirian keuangan daerah
						2.Meningkatkan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Badan Pendapatan Daerah	Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Perangkat Daerah	Nilai AKIP Badan Pendapatan Daerah

Pada Tahun 2025 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang menetapkan sebanyak 2 (dua) Tujuan dan 2 (dua) Sasaran Sasaran Strategis dengan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (*outcomes*) sesuai dengan Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025, dan Indikator Kinerja Utama yang bakal dicapai. 2 (dua) indikator kinerja yang akan dicapai dalam periode 3 (tiga) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPD Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026. Indikator Kinerja tersebut merupakan implementasi dari target pencapaian misi Kabupaten Tangerang.

Tujuan 1 : Meningkatkan Tata kelola pemerintahan yang akuntable dan transparan bidang pendapatan Daerah

Dengan indikator Nilai Indeks Kemandirian Fiskal

Tujuan 2 : Meningkatkan Kinerja Perangkat Daerah

Dengan indikator Nilai AKIP Badan Pendapatan Daerah

Sasaran 1 : Meningkatnya Rasio Kemandirian Fiskal Daerah
Nilai Indeks Kemandirian Fiskal

Sasaran 2 : Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah
Nilai AKIP Badan Pendapatan Daerah

Capaian Indikator Kinerja Utama sesuai dengan Indikator Tujuan dan Sasaran Strategis Tahun 2025

Dalam mengukur dan meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari Perangkat Daerah. Capaian Indikator Kinerja Utama ditentukan atas target yang akan dicapai dengan cara pengukuran atau formulasi yang telah ditetapkan. Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang Kinerja Utama ditentukan atas target yang akan dicapai dengan cara pengukuran atau formulasi yang telah ditetapkan.

Tabel 2.1.3
Capaian Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2025 s/d Triwulan II		
			Target	Realisasi	%
1	Nilai Indeks Kemandirian Fiskal	Angka	0,525	0,680	130,678

Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2025 yaitu, Nilai Indeks Kemandirian Fiskal.

Adapun realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp.2.274.867.093.305,- dari Target Rp.4.681.265.325.888,-.
Pendapatan Bagi Hasil terealiasai Rp. 508.254.005.683,- dari target Rp. 748.519.949.887,- Bantuan Keuangan Terealiasai Rp.0,- dari target Rp. 5.750.000.000,- DAK Fisik terealiasi Rp.0,- dari target Rp. 78.862.626.000,- DAK non Fisik terealiasi Rp. 221.756.177.291,- dari target Rp. 810.877.690.000,- Penerimaan Pinjaman Daerah terealisasi Rp.0,- dari target Rp.300.000.000.000,- dan Dana Bagi Hasil terealiasai Rp. 245.372.037.350,- dari target Rp. 268.920.635.000,-. Kemudian Dari gambaran tersebut Rasio Kemandirian Fiskal Daerah Kabupaten Tangerang pada tahun 2025 adalah 0,680.

Adapun komponen untuk menghitung IKF adalah diantaranya REVor, REVSH, TrSP, B, dan TrGP. REVor yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah mendapatkan realisasi Rp2.274.867.093.305.
Untuk REVSH atau bagi hasil teralisasi Rp168.414.024.600, selanjutnya untuk TrSP (DAK) terealisasi Rp367.635.121.463 dan terakhir TrGP sampai dengan TW II terealisasi Rp1.437.223.228.694. Kemudian Dari gambaran tersebut Indeks Kemandirian Fiskal Daerah Kabupaten Tangerang pada *tahun 2025 adalah 0,535.*

$$IKF = 1 - \frac{TrGP + TrSP + B + REVSH}{REVOR + TrGP + TrSP + B + RESVH'}$$

IKF =	1-	1.437.223.228.694+ 367.635.121.463 +0+ 168.414.024.600	
		———————————	= 0,535
		2.274.867.093.305+1.437.223.228. 694 + 367.635.121.463 + 0 + 168.414.024.600	

Tabel. 2.1.4
Capaian Tujuan dan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2025

No	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025 s/d Triw 2		
					Target	Realisasi	%
1.	Meningkatkan Tata kelola pemerintahan yang akuntable dan transparan bidang pendapatan Daerah	Meningkatnya Nilai Indeks Kemandirian Fiskal	Nilai Indeks Kemandirian Fiskal	Angka	0,525	0,535	101,90
2.	Meningkatkan Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Perangkat Daerah	Nilai AKIP Badan Pendapatan Daerah	Angka	81	-	-

Dari tabel tersebut terlihat bahwa terdapat perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU pada tahun 2025 sampai dengan 30 Juni 2025 telah mencapai target. Namun untuk mengetahui ketercapaian target sasaran secara penuh akan disajikan nanti pada dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di akhir tahun 2025.

Faktor Pendukung : Program pada Tujuan dan Sasaran 1
Capaian Pelaksanaan Program yang mendukung Tujuan dan Sasaran 1 adalah:

Tabel 2.1.5
Realisasi dan Capaian Program pada Tujuan dan Sasaran 1 s.d Triw II Tahun 2025

Laporan Realisasi dan Capaian Program Tahun 2025								
No.	**Program**	**Indikator Program**	**Satuan**	**Target**	**Realisasi**	**%**	**Keterangan**	**Rekomendasi Tindak Lanjut**
1.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Kepatuhan wajib pajak	Persen	79	30	37,97	Capaian Persentase Kepatuhan Wajib Pajak melampaui Target Triwulanan yaitu sebesar 25%.	Capaian kinerja akan terus dipertahankan
		Persentase Pemenuhan Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah	Persen	100	50	50	Capaian kinerja tercapai sesuai dengan target triwulanan	Capaian kinerja akan dicapai dan ditingkatkan
		Persentase Capaian Target Pajak Daerah	Persen	100	47,07	47,07	Capaian kinerja sudah sesuai dengan Target Triwulanan yaitu sebesar 25%.	Capaian kinerja akan terus dipertahankan
		Persentase Pemenuhan Layanan dan Pelaporan Data Informasi Pendapatan Daerah	Persen	100	50	50	Pemenuhan dokumen pelaporan data sesuai dengan target yang telah ditetapkan	Capaian kinerja akan terus dipertahankan

Dari capaian program diatas, terdiri dari 1 kegiatan dan 15 sub kegiatan yang mendukung realisasi capaian indikator program Pengelolaan Pendapatan Daerah.

1. **Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**
   Dari kegiatan ini diperoleh output dokumen pengelolaan pendapatan daerah dengan target 15 dokumen Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Adapun capaian dokumen tersbut berdasarkan output masing- masing sub kegiatan, diantaranya:

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Satuan	Target	Realisasi Indikator	Capaian (%)
BADAN PENDAPATAN DAERAH					
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	**Jumlah Dokumen Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**Dokumen**	**15**	**7**	**46,66**
Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Dokumen	2	-	0,00
Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Kebijakan Pajak Daerah	Dokumen	3	-	0,00
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebiajakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebiajakan Pajak Daerah	Laporan	4	2	50,00
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Unit	765	259	33,85
Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran objek pajak daerah, subjek pajak, dan wajib pajak daerah	Laporan	4	2	25,00
Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Laporan	4	2	25,00
Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek pajak yang disesuaikan NJOP nya	Objek	1	-	0,00
Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Dokumen	1	-	100,00
Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daserah	Layanan	2	2	100,00
Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang telah dilakukan Penelitian dan verifikasi	Dokumen	4	-	0
Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan penagihan pajak daerah	Dokumen	4	-	0
Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Dokumen	1	-	0
Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen hasil pemeriksaan serta pengendalian pengawasan pajak daerah	Dokumen	4	-	0
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	Jumlah laporan Hasil pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah	Laporan	4	-	0
Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah laporan perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Laporan	4	-	0

Dari tabel di atas ditampilkan target dan realisasi indikator sampai dengan Juni 2025. Terdapat beberapa sub kegiatan yang capaiannya masih 0%, hal ini dikarenakan sub kegiatan tersebut tidak memiliki target indikator di triwulan 1 dan 2, kegiatan sudah dilaksanakan dari triwulan 1 namun hasil kegiatannya terdapat di triwulan 3 dan 4.

Sasaran Tujuan dan Sasaran strategis 2 (Indikator Kinerja Pendukung) yakni **Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Perangkat Daerah** yang diukur dengan indikator kinerja Nilai AKIP Badan Pendapatan Daerah dari hasil review dan penilaian Tim Inspektorat.

Faktor Pendukung : Program pada Tujuan dan Sasaran 2

Capaian Pelaksanaan Program yang mendukung Tujuan dan Sasaran 2 adalah :

Tabel 2.1.12
Realisasi dan Capaian Program pada Tujuan dan Sasaran 2 Tahun 2025

Laporan Realisasi dan Capaian Program Tahun 2024								
No.	**Program**	**Indikator Program**	**Satuan**	**Target**	**Realisasi**	**%**	**Keterangan**	**Rekomendasi Tindak Lanjut**
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	Persen	100	50	50	Pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan sesuai dengan target yang telah ditetapkan	Capaian kinerja akan terus dipertahankan

Dari capaian program diatas, terdiri dari 7 kegiatan dan 23 sub kegiatan yang mendukung realisasi capaian indikator Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Terdapat satu sub kegiatan baru pada kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, yaitu Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya.

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Satuan	Target	Realisasi Indikator	Capaian (%)
BADAN PENDAPATAN DAERAH					
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan**	**Persen**	**100**	**50**	**50**
	Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	**Persen**	**100**	**50**	**50**
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Dokumen**	**13**	**5**	**38,46**
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6	2	33,33
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	1	100,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	3	2	66,67
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Dokumen Administrasi Keuangan**	**Dokumen**	**2**	**1**	**50,00**
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang meneriman Gaji dan Tunjangan	Orang/Bulan	175	155	88,57
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan akhir tahun dan Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Laporan	2	-	0,00
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah**	**Dokumen**	**2**	**-**	**0,00**
Penatausahaan Barang milik daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang milik daerah	Laporan	2	1	50
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Pembinaan Pegawai**	**Dokumen**	**3**	**1**	**33,33**
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	**1**	**1**	**100,00**
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	59	-	0,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Dokumen**	**7**	**7**	**100,00**
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	paket	1	1	100,00

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	paket	8	7	87,50
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	paket	4	1	25,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetakan dan Penggandaan	paket	2	2	100
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Dokumen	4	2	50,00
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	5	3	60,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	8	4	50,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Dokumen Jasa Penunjang**	**Dokumen**	**3**	**3**	**100,00**
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	4	2	50,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan	9	5	55,56
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	12	6	50,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Dokumen**	**5**	**5**	**100,00**
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	6	6	100,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	118	118	100
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	8	8	100
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	6	4	66,67
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	2	50,00

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan tentang Peningkatan Pendapatan Daerah

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang di dalam pelaksanaan kegiatannya, secara umum telah menunjukkan kinerja yang baik. Hal tersebut didasarkan pada analisis pengukuran kinerja kegiatan dengan realisasi yang dicapai dari masing-masing indikator. Berdasarkan nilai capaian kegiatan tersebut, maka kinerja kegiatan dapat diartikan bahwa program dan kegiatan sebagian besar dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Tangerang telah melakukan upaya semaksimal mungkin guna meraih target Pendapatan Daerah yang ditetapkan, hal tersebut dibuktikan dari target PAD tahun 2025 Rp. 4.681.265.325.888,- sampai dengan 30 Juni 2025 sudah terealisasi sebesar Rp.2.274.867.093.305,- atau 48,60%.

Tabel 2.4.1
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang S.D. TW 2 Tahun 2025

Kode Rekening	Uraian	Target	Realisasi	%
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**4.681.265.325.888**	**2.274.867.093.305**	**48,60**
4.1.01	Pajak Daerah	3.763.500.000.000	1.771.503.920.124	47,07
4.1.02	Retribusi Daerah	173.297.291.886	87.137.072.275	50,28
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	60.509.521.940	27.640.353.616	45,68
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	683.958.512.062	388.585.747.290	56,81

(Terlampir : BA CAPAIAN TARGET PENDAPATAN ASLI DAERAH s/d MARET TAHUN 2025)

Beberapa upaya pendukung capaian indikator kinerja sasaran dalam bentuk inovasi yang telah dilakukan dan dikembangkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang pada tahun 2025 antara lain:

1) Perluasan jaringan Layanan Pembayaran PBB melalui e-commerce.
2) Digitalisasi Pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah melalui Kanal Pembayaran QRIS dan Virtual Account.
3) Rekonsiliasi semua kanal menggunakan aplikasi Pay On Pride.
4) Intensifikasi layanan Mobil keliling jemput bola pembayaran PBB-P2 secara terjadwal ke seluruh desa di Kabupaten Tangerang.
5) Implementasi teknologi informasi layanan pajak daerah guna meningkatkan kemudahan masyarakat dalam membayar pajak melalui Aplikasi Sistem Informasi Cetak PBB Online Terpadu (siCepot).

6) Implementasi Aplikasi i-PBB untuk memberi kemudahan masyarakat dalam pembayaran PBB melalui playstore smartphone.
7) Kerjasama penagihan pajak daerah dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang.
8) Kerjasama pemetaan data wilayah PBB dengan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tangerang.
9) Kerjasama pemetaan wilayah PBB dengan Badan Pertana
10) Implementasi Aplikasi pelayanan secara online e-BPHTB yang menghubungkan layanan PBB dengan layanan BPN dan Kantor Notaris/PPAT.
11) Pendataan dan survey subjek pajak dan objek pajak guna mengetahui informasi berkaitan dengan objek pajak dan subjek pajak yang telah memenuhi syarat tetapi belum terdaftar sebagai wajib pajak. Tujuan akhir dari kegiatan ini diharapkan wajib pajak secara sukarela mendaftarkan diri atau berdasarkan data yang dimiliki fikus melakukan pengukuhan secara jabatan dan mengenakan pajak atas subjek pajak atau objek pajak yang semula belum dikenakan pajak.
12) Implementasi pemasangan alat rekam dilakukan pada objek pajak restoran, pajak parkir dan pajak hiburan dalam bentuk pemasangan tapping box, tapping server dan bluetooth thermal printer
13)

Permasalahan :

- Kualitas layanan pajak daerah kepada masyarakat masih perlu ditingkatkan.
- Masih terdapat masyarakat yang belum patuh dalam membayar dan mentaati ketentuan pajak daerah.
- Belum terintegrasinya digitalisasi pelayanan pajak daerah

Solusi :

Solusi yang dapat diambil sebagai langkah perbaikan atas permasalahan tersebut diatas perlu dilakukan beberapa aksi antara lain:

- Upaya peningkatan kualitas layanan pajak daerah melalui pemanfaatan aplikasi teknologi sistem informasi pelayanan pajak daerah guna mempermudah dan mempercepat layanan pajak daerah, pelayanan mobil keliling PBB, upaya perluasan jaringan pembayaran pajak daerah, penguatan peran dan fungsi UPT Pajak Daerah sebagai percepatan pelayanan semua jenis pajak daerah kepada masyarakat.
- Upaya optimalisasi pengawasan pajak daerah melalui kegiatan pemeriksaan pajak daerah serta monitoring pajak dan retribusi daerah sebagai penerapan sanksi administrasi terhadap kelalaian pembayaran pajak.
- Pemberian pembekalan berupa bimtek terkait pelayanan publik untuk meningkatkatkan efektivitas dan kualitas pelayanan publik.
- Upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak melalui sosialisasi kepada masyarakat, mencari calon wajib pajak baru sebanyak-banyaknya, pendataan potensi pajak, koordinasi dengan stakeholder terkait dan pemanfaatan aplikasi teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi pajak daerah secara terpadu.
- Upaya pemasangan alat perekam data transaksi pajak daerah secara

online dan real time kepada wajib pajak Restoran, Hiburan, Parkir, dan Hotel untuk mengawasi tingkat kepatuhan dan kejujuran wajib pajak yang dapat mendorong peningkatan pembayaran pajak secara intensifikasi.

- Integrasi sistem pelayanan pajak daerah

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.

Isu strategis Pemerintah Kabupaten Tangerang 2024 - 2026 adalah:

1. Peningkatan Kualitas SDM;
2. Pembangunan Gender;
3. Penurunan Tingkat Pengangguran;
4. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi;
5. Penurunan Kemiskinan;
6. Penurunan Ketimpangan Pendapatan;
7. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
8. Kualitas Infrastruktur yang Berkelanjutan;
9. Kualitas Lingkungan Hidup yang Sehat dan Tangguh Bencana;
10. Penguatan Nilai Keagamaan dan Budaya Lokal.

Isu Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang tahun 2024 - 2026 yang mendukung isu strategis daerah tersebut khususnya yang berkaitan dengan Peningkatan tata kelola pemerintahan (good governance) adalah :

1. Kualitas layanan dan tata laksana pajak daerah perlu semakin dipermudah, dipercepat, dan akurat;
2. Tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak masih tergolong rendah, perlu upaya pasif dan aktif untuk menindaklanjutinya;
3. Kualitas alat perekam data pajak;
4. Pengelolaan sistem informasi data dan pelaporan harus dilakukan secara terintegrasi dan realtime;
5. Penyusunan target pendapatan asli daerah perlu mempertimbangkan potensi.

Tabel 2.3.1
Identifikasi Permasalahan dan Isu Strategis Badan Pendapatan Daerah

MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
Kontribusi PAD sebagai salah satu sumber pembiayaan APBD Kab Tangerang senantiaasa diharapkan semakin meningkat setiap tahunnya	Masih terdapat permasalahan dalam tatalaksana dan layanan pajak daerah	Masih terjadi kendala dalam tatalaksana pendataan dan pendaftaran wajib pajak
		Masih terjadi kendala dalam layanan penilaian dan penetapan pajak daerah
		Masih terjadi kendala dalam layanan penyelesaian keberatan
	Masih terdapat permasalahan dalam aktivitas pengawasan dan pengendalian	Masih terdapat laporan Pajak Wajib Pajak Self Assesment yang disampaikan belum mencerminkan fakta yang sebenarnya
		Masih banyak terdapat Objek Pajak Potensial yang belum terpasang alat perekam transaksi
		Belum optimalnya upaya penagihan dan pemberlakuan sanksi terhadap Wajib Pajak yang tidak taat
	Masih terdapat permasalahan dalam pengelolaan data informasi pelaporan secara terintegrasi	Perlu adanya Verifikasi dan Analisa data sebelum tersusunnya laporan
		Belum optimalnya pemahaman masyarakat terhadap ketentuan dan kewajiban pajak daerah
		Perkembangan Teknologi Informasi pendukung layanan perlu dikelola dan dimanfaatkan (Hardware dan Software)
	Masih terdapat permasalahan dalam kualitas perencanaan dan pengembangan potensi serta regulasi pendukung pendapatan daerah	Masih terdapat potensi pendapatan daerah yang belum terakomodasi dalam perencanaan target pendapatan
		Basis data dan kebutuhan jaringan sistem informasi pelaporan semakin berkembang
		Regulasi pendapatan daerah senantiasa berkembang sesuai kondisi terkini
	Masih kurang optimalnya kinerja pegawai Badan Pendapatan Daerah	Masih kurangnya pelatihan dan pengembangan kompetensi yang sesuai dengan tugas dan fungsi pegawai.
		Pengelolaan SDM yang kurang efektif, seperti penempatan pegawai yang tidak sesuai dengan keahlian pegawai
		Proses birokrasi dan prosedur administrasi yang kurang efisien yang dapat menghambat pekerjaan pegawai.

Solusi :

Solusi yang dapat diambil sebagai langkah perbaikan atas permasalahan tersebut diatas perlu dilakukan beberapa aksi antara lain:

- Upaya peningkatan kualitas layanan pajak daerah melalui pemanfaatan aplikasi teknologi sistem informasi pelayanan pajak daerah guna mempermudah dan mempercepat layanan pajak daerah, pelayanan mobil keliling PBB, upaya perluasan jaringan pembayaran pajak daerah, penguatan peran dan fungsi UPT Pajak Daerah sebagai percepatan pelayanan semua jenis pajak daerah kepada masyarakat.
- Upaya optimalisasi pengawasan pajak daerah melalui kegiatan pemeriksaan pajak daerah serta monitoring pajak dan retribusi daerah sebagai penerapan sanksi administrasi terhadap kelalaian pembayaran pajak.
- Upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak melalui sosialisasi kepada masyarakat, mencari calon wajib pajak baru sebanyak-banyaknya, pendataan potensi pajak, koordinasi dengan stakeholder terkait dan pemanfaatan aplikasi teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi pajak daerah secara terpadu.
- Upaya pemasangan alat perekam data transaksi pajak daerah secara online dan real time kepada wajib pajak Restoran, Hiburan, Parkir, dan Hotel untuk mengawasi tingkat kepatuhan dan kejujuran wajib pajak yang dapat mendorong peningkatan pembayaran pajak secara intensifikasi.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan Awal Rencana Kerja Perubahan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2025 disusun berdasarkan evaluasi hasil Capaian Indikator Kinerja tahun 2024 dan tahun berjalan sampai dengan triwulan 1 tahun 2025. Setiap bidang dan sub bagian melakukan penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Perubahan Tahun Anggaran 2025 berdasarkan penjabaran Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026 yang nomenklaturnya mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Rencana Kerja Perubahan Badan Pendapatan Daerah tahun 2025 sesuai dengan Renstra Tahun 2024-2026, rencana kerja ini agar mewujudkan konsistensi dokumen perencanaan. Sehingga dapat mewujudkan seluruh program dan kegiatan Kabupaten Tangerang yang telah ditetapkan.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dari hasil Musrenbang Desa dan Musrenbang Kecamatan melalui Format F1 Kecamatan, untuk tahun anggaran 2025 Perubahan tidak terdapat usulan program dan kegiatan dari masyarakat untuk dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang, sehingga program dan kegiatannya secara umum bersifat tugas pokok fungsi OPD dan tidak pada aspek pemberdayaan masyarakat. Namun pada prinsipnya kami Badan Pendapatan Daerah tetap akan melakukan pelayanan terbaik kepada masyarakat di Kabupaten Tangerang.

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2025

Badan Pendapatan Daerah					
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	Berdasarkan Hasil dari MUSRENBANG dan pengumpulan informasi dari para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat , LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi, belum ada usulan kegiatan kepada Badan Pendapatan Daerah				

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH APBD PERUBAHAN TAHUN 2025

3.1 Rencana Kerja dan Pendanaan APBD Perubahan Tahun 2025

Badan Pendapatan Daerah di Rencana Kerja Perubahan pada tahun 2025 mendapat tambahan anggaran yaitu untuk Tambahan Gaji, TPBK Rp.2.313.639.192, Tambahan Pagu Belanja Kegiatan sebesar Rp.2.500.000.000,- dan untuk THR NON PNS sebesar Rp. 250.500.000,-,

Total Tambahan Anggaran Badan Pendapatan Daerah pada ABPD Perubahan 2025 sebesar Rp.5.064.138.192,- yang tersebar di 2 Program yaitu Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Tambahan anggaran ini dibutuhkan ditujukan untuk mecapai target sasaran berupa Nilai Indeks Kemandirian Fiskal dan Nilai AKIP Badan Pendapatan Daerah.

Program kegiatan yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2025 sebanyak 2 Program, 8 Kegiatan, dan 38 Sub Kegiatan. Adapun anggaran program kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini;

Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Jumlah Anggaran Program	Anggaran		Selisih (Tambah/Kurang)
			APBD Murni	APBD Perubahan	
	Pengelolaan Pendapatan Daerah	**10.G32.6GG.350**			
	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah		511.215.000	509.715.000	-1.500.000
	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah		134.160.000	130.440.000	-3.720.000
	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah		524.500.000	524.500.000	-
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah		3.327.300.000	3.327.300.000	-
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah		1.129.930.800	1.055.838.000	-74.092.800
	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah		872.501.500	818.361.500	-54.140.000
Pengelolaan Pendapatan Daerah	*Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)*		394.000.500	415.240.500	21.240.000
	Penetapan Wajib Pajak Daerah		402.139.000	421.471.000	19.332.000
	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah		1.533.905.600	1.412.266.400	-121.639.200
	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah		48.937.000	48.937.000	-
	Penagihan Pajak Daerah		907.246.550	933.186.550	25.940.000
	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah		1.460.000	1.460.000	-
	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah		498.587.400	498.587.400	-
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		160.692.000	160.692.000	-
	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah		486.124.000	786.634.000	300.510.000
	JUMLAH				**111.G30.000**

Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Jumlah Anggaran Program	Anggaran		Selisih (Tambah/Kurang)
			APBD Murni	APBD Perubahan	
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**110.74G.252.523**			
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		66.617.000	66.617.000	-
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		21.076.000	21.076.000	-
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		262.691.440	292.283.200	29.591.760
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				-
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		**94.656.436.031**	**96.970.075.223**	2.313.639.192
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		14.595.000	14.595.000	-
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				-
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		17.403.000	17.403.000	-
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				-
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		187.796.000	198.116.000	10.320.000
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		213.100.000	221.300.000	8.200.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				-
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		79.422.000	79.422.000	-
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		2.004.477.170	2.579.009.170	574.532.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		620.749.600	956.178.500	335.428.900
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		1.011.073.050	1.469.547.092	458.474.042
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		80.188.000	80.188.000	-
	Fasilitasi Kunjungan Tamu		198.775.000	237.100.000	38.325.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		673.339.000	573.539.000	-99.800.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		6.264.000	6.264.000	-
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		1.552.265.988	1.560.957.024	8.691.036
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		5.297.629.568	5.490.236.480	192.606.912
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		237.814.956	237.814.956	-
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		1.398.659.720	1.398.659.720	-
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		763.500.000	763.500.000	-
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		825.300.000	1.414.800.000	589.500.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		560.080.000	1.052.780.000	492.700.000
	JUMLAH				**4.G52.208.842**

Tabel 3.1
Kerangka Pendanaan dan Target Indikator Program dan Kegiatan Tahun 2025 APBD Perubahan

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	APBD murni	APBD Perubahan	Selisih Tambah/(Kurang)	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Satuan	Target Murni	Target Perubahan
	BADAN PENDAPATAN DAERAH	**121.681.951.873**	**126.746.090.715**	**5.064.138.842**				
5.02.04	**Program Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**10.932.699.350**	**11.044.629.350**	**111.930.000**	**Persentase Kepatuhan Wajib Pajak**	**Persen**	**78**	**79**
					Persentase Pemenuhan Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah	**Persen**	**100**	**100**
					Persentase Capaian Target Pajak Daerah	**Persen**	**100**	**100**
					Persentase Pemenuhan Layanan dan Pelaporan Data Informasi Pendapatan Daerah	**Persen**	**100**	**100**
5.02.04.2.01	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**10.932.699.350**	**11.044.629.350**	**111.930.000**	**Jumlah Dokumen Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**Dokumen**	**15**	**15**
5.02.04.2.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	511.215.000	509.715.000	-1.500.000	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Dokumen	2	3
5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	134.160.000	130.440.000	-3.720.000	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Dokumen	3	3
5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebiajakan Pajak Daerah	524.00.000	524.500.000	0	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Laporan	4	4

5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	3.327.300.000	3.327.300.000	0	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Unit	640	765
5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	1.129.930.800	1.055.838.000	- 74.092.800	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	4	4
5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	872.501.500	818.361.500	- 54.140.000	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Laporan	4	4
5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	394.000.500	415.240.500	21.240.000	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Objek	1	1
5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah	402.139.000	421.471.000	19.332.000	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Dokumen	1	1
5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	1.533.905.600	1.412.266.400	- 121.639.200	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Layanan	2	2
5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	48.937.000	48.937.000	0	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Dokumen	4	4
5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah	907.246.550	933.186.550	25.940.000	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Dokumen	4	4
5.02.04.2.01.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	1.460.000	1.460.000	0	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Dokumen	1	1
5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	498.587.400	498.587.400	0	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Dokumen	4	4
5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	160.692.000	160.692.000	40.831.000	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	4	4
5.02.04.2.01.0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	486.124.000	786.634.000	300.510.000	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Laporan	4	2

5.02.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**110.749.252.523**	**115.701.461.365**	**4.952.208.842**	**Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan**	**Persen**	**100**	**100**
5.02.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**350.384.440**	**379.976.200**	**29.591.760**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Dokumen**	**13**	**15**
5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	66.617.000	66.617.000	0	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6	6
5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	21.076.000	21.076.000	0	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	1
5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	262.691.440	292.283.200	29.591.760	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	3	8
5.02.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**94.671.031.031**	**96.984.670.223**	**2.313.639.192**	**Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah**	**Dokumen**	**2**	**2**
5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	94.656.436.031	96.970.075.223	2.313.639.192	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	175	175
5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	14.595.000	14.595.000	0	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	2	2
5.02.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**17.403.000**	**17.403.000**	**0**	**Jumlah dokumen Barang Milik Daerah**	**Dokumen**	**2**	**2**
5.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang milik daerah	17.403.000	17.403.000	-	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	2	2
5.02.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**400.896.000**	**419.416.000**	**18.520.000**	**Jumlah Pegawai yang difasilitasi**	**Dokumen**	**3**	**3**
5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	187.796.000	198.116.000	10.320.000	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	1

5.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	213.100.000	221.300.000	8.200.000	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	85	71
5.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**4.668.023.820**	**5.974.983.762**	**1.306.959.942**	**Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Dokumen**	**7**	**7**
5.02.01.2.06.0001	Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	79.422.000	79.422.000	0	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	1	1
5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.004.477.170	2.579.009.170	574.532.000	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	7	8
5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	620.749.600	956.178.500	335.428.900	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	1	1
5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.011.073.050	1.469.547.092	458.474.042	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket	2	2
5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	80.188.000	80.188.000	0	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	1
5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	198.775.000	237.100.000	38.325.000	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	2	2
5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	673.339.000	573.539.000	-99.800.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	3	3
5.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**6.856.159.556**	**7.057.457.504**	**201.297.948**	**Jumlah Laporan Jasa Penunjang Perangkat Daerah**	**Dokumen**	**3**	**3**
5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.264.000	6.264.000	0	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1
5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.552.265.988	1.560.957.024	8.691.036	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	3	3
5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.297.629.568	5.490.236.480	192.606.912	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	3	3

5.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**3.785.354.676**	**4.867.554.676**	**1.082.200.000**	**Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	**Dokumen**	**5**	**5**
5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	237.814.956	237.814.956	0	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	6	6
5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.398.659.720	1.398.659.720	0	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	148	148
5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	763.500.000	763.500.000	0	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	210	210
5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	825.300.000	1.414.800.000	589.500.000	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4	12
5.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	560.080.000	1.052.780.000	492.700.000	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	9

3.2 Perkiraan Maju Kerangka Pendanaan Tahun 2026

Program kegiatan yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2026 sebanyak 2 Program, 8 Kegiatan dan 38 Sub Kegiatan. Adapun anggaran program kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 3.2
Kerangka Pendanaan Program dan Kegiatan Tahun 2026

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Anggaran (Rp.)	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Satuan	Target indikator
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	11.343..334.500	Persentase Kepatuhan Wajib Pajak	%	80
		Persentase Pemenuhan Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah	%	100
		Persentase Pemenuhan Layanan dan Pelaporan Data Informasi Pendapatan Daerah	%	100
		Persentase Capaian Target Pajak Daerah	%	100
Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	11.343..334.500	Jumlah Dokumen Pengelolaan Pendapatan Daerah	Dokumen	15
Perencanaan pengelolaan pajak daerah	487.000.000	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Dokumen	3
Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	297.500.000	Jumlah Dokumen Hasil Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Kebijakan Pajak Daerah	Dokumen	2
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	320.000.000	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebiajakan Pajak Daerah	Laporan	4
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	3.327.300.000	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Unit	765
Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	892.350.000	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran objek pajak daerah, subjek pajak, dan wajib pajak daerah	Laporan	4
Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	934.059.500	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Laporan	4
Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	487.700.000	Jumlah Objek pajak yang disesuaikan NJOP nya	Objek	1
Penetapan Wajib Pajak Daerah	427.800.000	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Dokumen	1
Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	1.525.000.000	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daserah	Layanan	2

Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	72.000.000	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang telah dilakukan Penelitian dan verifikasi	Dokumen	4
Penagihan Pajak Daerah	1.224.550.000	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan penagihan pajak daerah	Dokumen	4
Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	4.875.000	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Dokumen	1
Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	645.000.000	Jumlah Dokumen hasil pemeriksaan serta pengendalian pengawasan pajak daerah	Dokumen	4
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	210.000.000	Jumlah laporan Hasil pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah	Laporan	4
Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	488.200.000	Jumlah laporan perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Laporan	4
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**110.526.186.988**	**Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan**	**%**	**100**
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**457.048.400**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Dokumen**	**13**
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	79.294.400	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	8
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	33.621.000	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	344.133.000	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**95.256.728.588**	**Jumlah dokumen dokumen adminstrasi keuangan**	**Dokumen**	**2**
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	95.228.870.088	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan	Orang	175
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	27.858.500	Jumlah Laporan Keuangan akhir tahun dan Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Laporan	2
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**20.000.000**	**Jumlah dokumen dokumen Barang Milik Daerah**	**Dokumen**	**3**
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	20.000.000	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang milik daerah	Laporan	3
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	281.350.000	Jumlah dokumen Pembinaan Pegawai	Dokumen	2
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	68.250.000	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	2
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	213.100.000	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	67

Administrasi Umum Perangkat Daerah	**4.412.250.000**	**Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Dokumen**	**7**
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	42.000.000	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Paket	1
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.108.000.000	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	5
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	627.500.000	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket	3
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.167.750.000	Jumlah paket Barang Cetakan dan Penggandaan	Paket	3
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	74.700.000	Jumlah Dokumen Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Dokumen	1
Fasilitasi Kunjungan Tamu	250.000.000	Jumlah Laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	12
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.142.300.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	3
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**6.646.140.000**	**Jumlah dokumen Jasa Penunjang**	**Dokumen**	**3**
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000	Jumlah Laporan Penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	4
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.478.500.000	Jumah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan	12
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.157.640.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	7
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**3.452.670.000**	**Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Dokumen**	**5**
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	238.320.000	Jumlah Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	6
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.406.000.000	Jumlah Kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	148
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	748.350.000	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	210
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	600.000.000	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	4
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	460.000.000	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	3

BAB IV
PENUTUP

4.1 Catatan Penting dalam Penyusunan Renja Perubahan

Dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2025 perlu menetapkan program prioritas dan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran Perubahan 2025 yang bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten Tangerang berdasarkan sasaran-sasaran yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tangerang 2024-2026 dan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang tahun 2024-2026.

Alokasi Anggaran Indikatif pada APBD Perubahan tahun 2025 yang diperuntukan membiayai seluruh Program Kegiatan, Kegiatan dan Sub kegiatan adalah sebesar Rp. 126.746.090.715,- (Seratus Dua Puluh Enam Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Juta Sembilan Puluh Ribu Tujuh Ratus Lima Belas Rupiah) yang terbagi dalam dua program, yaitu Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam rangka optimalisasi pencapaian hasil pada pelaksanaan program dan kegiatan, dibutuhkan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan dalam satu program maupun antar sub kegiatan, dalam satu instansi maupun antar pemegang kebijakan dalam instansi dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang.

4.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD sebagai pengganti Permendagri nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka kaidah-kaidah penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang.

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis Tahun 2024-2026 serta Surat edaran Bupati Tangerang Nomor B/100.3.4/9228/BAPPEDA/2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025.

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2025 adalah upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Tangerang dengan berpedoman pada dokumen perencanaan yang telah disusun sedemikian rupa.

Pelaksanaan semua program dan kegiatan harus memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan baik dalam satu bidang maupun antar bidang, dengan tetap memperhatikan tugas, fungsi dan tanggung jawab yang melekat pada masing-masing bidang dan seksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4.3 Rencana Tindak Lanjut

1. Setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan harus memiliki dampak pada pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang;
2. Program dan kegiatan tersebut bersifat mendesak dan penting untuk segera dilaksanakan;
3. Program dan kegiatan tersebut dapat diselesaikan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025.
4. Perubahan Target Indikator Kegiatan

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Badan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2025 dilakukan sebagai upaya untuk menciptakan keselarasan atas Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD Perubahan Kabupaten Tangerang Tahun 2025 sehingga tercipta sinergi dalam pelaksanaan pembangunan terutama dalam peningkatan Pendapatan Daerah dalam menopang pembangunan daerah yang selaras dalam RKPD Perubahan Kabupaten Tangerang Tahun 2025.

5. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, setiap OPD dapat menyusun Rencana Kerja (Renja) Perubahan dengan merujuk pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Perubahan dilakukan akibat adanya ketidaksesuaian rencana kerja dengan perkembangan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi dan keuangan daerah serta perubahan kebijakan nasional maupun provinsi, sehingga mempengaruhi pelaksanaan Program dan Kegiatan OPD secara langsung maupun tidak langsung. Menindaklanjuti hal tersebut, penyusunan Renja Perubahan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tangerang (BPKAD Kabupaten Tangerang) Tahun 2025 dilakukan dengan tetap merujuk kepada Renstra BPKAD Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026 serta memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tangerang Tahun 2025.

Adapun dokumen Renja Perubahan Renstra BPKAD Kabupaten Tangerang Tahun 2025 memuat perubahan dan pergeseran anggaran antar kegiatan dan antar jenis belanja. Hal ini dilakukan akibat adanya perkembangan kondisi dan progres kegiatan di lapangan. Perubahan juga dilakukan dalam upaya mengoptimalkan pemanfaatan anggaran yang tersedia sehingga menghasilkan output dan memberikan outcome yang mendukung pencapaian target Renstra BPKAD Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026.

Renja Perubahan BPKAD Kabupaten Tangerang Tahun 2025 mengakomodir adanya dinamika dalam pelaksanaan kegiatan di BPKAD Kabupaten Tangerang Tahun 2024 selama Triwulan 1.

1.2 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali dirubah dan terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan ke dua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Tangerang;
13. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2005 – 2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Derah Kabupaten Tangerang;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026;
16. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tangerang;
17. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 59 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi ,Tugas Pokok dan Rincian Tugas serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Penggunausahaan dan Penyimpanan Barang Milik Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tangerang

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renja Perubahan-BPKAD Tahun Anggaran 2025, dimaksudkan untuk menyiapkan dokumen perencanaan tahunan BPKAD Kabupaten Tangerang, sebagai implementasi dari pentahapan Rencana Strategis yang memuat tentang kumpulan kegiatan prioritas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi untuk periode satu tahun anggaran.

Sedangkan tujuan dari Penyusunan Renja Perubahan-BPKAD Tahun Anggaran 2025 ini adalah :

A. Sebagai implementasi BPKAD Kabupaten Tangerang atas Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
B. Sebagai acuan BPKAD Kabupaten Tangerang dalam melaksanakan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ;
C. Sebagai alat kontrol organisasi dalam mengendalikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan tahunan;
D. Sebagai tolok ukur keberhasilan BPKAD Kabupaten Tangerang dalam mengemban visi dan misi pemerintah daerah;
E. Sebagai acuan dalam melaksanakan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Renja Perubahan-BPKAD Tahun Anggaran 2025 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan
Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum penyusunan Renja, maksud dan tujuan penyusunan Renja dan sistematika penulisan dokumen Renja.

Bab II Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan I Tahun Anggaran 2025.
Bab ini memuat evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Renja Bappeda Tahun 2025 hingga Triwulan I. Analisis Kinerja Pelayanan BPKAD Kabupaten Tangerang, Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Fungsi BPKAD Kabupaten Tangerang

Bab III Rencana Kerja Dan Pendanaan
Bab ini memaparkan perbandingan program dan kegiatan dari sebelum dan sesudah perubahan Anggaran Tahun 2025

Bab IV Penutup
Berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

BAB II
EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja BPKAD Kabupaten Tangerang Sampai Dengan Triwulan I Tahun Anggaran 2025

Proses penyusunan suatu perencanaan erat kaitannya dengan proses evaluasi, dari proses evaluasi tersebut dapat terindentifikasi dua hal yaitu, sejauhmana proses perencanaan pembangunan dilaksanakan oleh seluruh SKPD dan permasalahan-permasalahan yang menghambat pelaksanaan perencanaan pembangunan tersebut. Hasil evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026 yang memuat indikator keberhasilan suatu proses perencanaan pembangunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, dijadikan tolak ukur untuk menilai sejauh mana perencanaan pembangunan telah dilaksanakan. Renstra tersebut juga dijadikan panduan Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Tangerang dalam membuat perencanaan tahunan dilingkungan Kabupaten Tangerang.

Evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun 2025 dilaksanakan sampai dengan Triwulan I, hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai bahan penyusunan Renja Perubahan-BPKAD tahun 2025. Adapun rincian pelaksanaan rencana kerja tahun 2024 dilaksanakan sampai dengan Triwulan I adalah sebagai berikut:

A. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Pada Tahun Anggaran 2025, Program Pengelolaan Keuangan Daerah menetapkan tiga indikator utama sebagai ukuran kinerja. Indikator pertama adalah persentase kinerja pengelolaan anggaran daerah, dengan target capaian sebesar 98,25%. Indikator kedua mencakup persentase kinerja pengelolaan akuntansi daerah, yang ditargetkan mencapai 95%. Sementara itu, indikator ketiga adalah persentase kinerja pengelolaan perbendaharaan daerah dengan target capaian kinerja sebesar 100%. Pagu Program Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 4.230.373.800.

Adapun capaian realisasi keuangan dan output fisik dari kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam program tersebut akan diuraikan pada bagian berikut:

1. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah

Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah pada Tahun Anggaran 2025 ditujukan untuk menghasilkan output berupa jumlah dokumen rencana anggaran dengan target sebanyak 18 dokumen. Target tersebut dilaksanakan melalui sejumlah sub kegiatan yang secara keseluruhan didukung oleh pagu anggaran sebesar Rp1.857.809.600. Selanjutnya, capaian output, realisasi keuangan, serta realisasi fisik dari masing-masing sub kegiatan akan dijabarkan pada bagian berikut:

a. Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS

Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS pada Tahun Anggaran 2025 memiliki indikator kinerja berupa jumlah dokumen KUA dan PPAS yang disusun, dengan target sebanyak 1 (satu) dokumen.. Kegiatan ini awalnya dialokasikan anggaran sebesar Rp213.914.000. Namun, sejalan dengan kebijakan efisiensi anggaran berdasarkan instruksi Presiden, dilakukan penyesuaian pada beberapa rekening belanja, meliputi: (1) bahan cetak, (2) makan dan minum, (3) sewa hotel, (4) perjalanan dinas. Setelah penyesuaian, pagu anggaran menjadi Rp178.325.000. Sampai dengan akhir Triwulan I, belum terdapat realisasi kegiatan baik secara fisik maupun keuangan. Hal ini dikarenakan kegiatan Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS baru dijadwalkan akan dilaksanakan mulai Triwulan III tahun anggaran berjalan.

b. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS

Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS pada Tahun Anggaran 2025 memiliki indikator kinerja berupa jumlah dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang disusun, dengan target sebanyak 1 (satu) dokumen. Kegiatan ini awalnya dialokasikan anggaran sebesar Rp. 209.594.000. Namun, sejalan dengan kebijakan efisiensi anggaran berdasarkan instruksi Presiden, dilakukan penyesuaian pada beberapa rekening belanja, meliputi: (1) bahan cetak, (2) sewa hotel, (3) perjalanan dinas. Setelah penyesuaian, pagu anggaran menjadi Rp. 175.395.000. Sampai dengan akhir Triwulan I, belum terdapat realisasi kegiatan baik secara fisik maupun keuangan. Hal ini dikarenakan kegiatan Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS baru dijadwalkan akan dilaksanakan mulai Triwulan III tahun anggaran berjalan.

c. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD

Sub kegiatan Koordinasi, Penyusunan, dan Verifikasi RKA-SKPD pada Tahun Anggaran 2025 memiliki indikator kinerja berupa jumlah dokumen RKA-SKPD yang diverifikasi, dengan target capaian sebanyak 1 (satu) dokumen. Kegiatan ini awalnya dialokasikan anggaran sebesar Rp. 189.840.000. Namun, sejalan dengan kebijakan efisiensi anggaran berdasarkan instruksi Presiden, dilakukan penyesuaian pada beberapa rekening belanja, meliputi: (1) bahan cetak, (2) sewa hotel, (3) perjalanan dinas. Setelah penyesuaian, pagu anggaran menjadi Rp. 176.124.000. Sampai dengan akhir Triwulan I, belum terdapat realisasi kegiatan baik secara fisik maupun keuangan. Hal ini dikarenakan kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS baru dijadwalkan akan dilaksanakan mulai Triwulan III tahun anggaran berjalan.

d. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD

Sub kegiatan Koordinasi, Penyusunan, dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD Tahun Anggaran 2025 memiliki indikator kinerja berupa jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD yang diverifikasi, dengan target sebanyak 1 (satu) dokumen. Kegiatan ini awalnya dialokasikan anggaran sebesar Rp. 186.060.000. Namun, sejalan

dengan kebijakan efisiensi anggaran berdasarkan instruksi Presiden, dilakukan penyesuaian pada beberapa rekening belanja, meliputi: (1) makan dan minum, (2) sewa hotel, (3) perjalanan dinas. Setelah penyesuaian, pagu anggaran menjadi Rp. 153.576.000. Sampai dengan akhir Triwulan I, belum terdapat realisasi kegiatan baik secara fisik maupun keuangan. Hal ini dikarenakan kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD baru dijadwalkan akan dilaksanakan mulai Triwulan III tahun anggaran berjalan.

e. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD

Sub kegiatan Koordinasi, Penyususan dan Verifikasi DPA-SKPD Tahun Anggaran 2025 memiliki indikator kinerja berupa jumlah DPA- SKPD yang diverifikasi dengn target sebanyak 1 (satu) dokumen. Kegiatan ini awalnya dialokasikan anggaran sebesar Rp. 84.612.000. Namun, sejalan dengan kebijakan efisiensi anggaran berdasarkan instruksi Presiden, dilakukan penyesuaian pada beberapa rekening belanja, meliputi: (1) sewa hotel, (2) perjalanan dinas. Setelah penyesuaian, pagu anggaran menjadi Rp. 72.048.000. Pada Triwulan I, sub kegiatan ini telah terealisasi sebesar Rp. 8.370.000 atau 11,62% dari total pagu anggaran. Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan asistensi dalam rangka verifikasi DPA SKPD Tahun 2025.

f. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD

Sub kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD Tahun Anggaran 2025 memiliki indikator kinerja berupa Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi dengan target sebanyak 1 (satu) dokumen. Kegiatan ini awalnya dialokasikan anggaran sebesar Rp. 84.882.000. Namun, sejalan dengan kebijakan efisiensi anggaran berdasarkan instruksi Presiden, dilakukan penyesuaian pada beberapa rekening belanja, meliputi: (1) makan minum rapat, (2) sewa hotel, (3) perjalanan dinas. Setelah penyesuaian, pagu anggaran menjadi Rp. 69.918.000. Sampai dengan akhir Triwulan I, belum terdapat realisasi kegiatan baik secara fisik maupun keuangan. Hal ini dikarenakan kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD baru dijadwalkan akan dilaksanakan mulai Triwulan III tahun anggaran berjalan.

g. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD

Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 memiliki indikator kinerja berupa jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dengan target sebanyak 2 (dua) dokumen yaitu Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup). Kegiatan ini awalnya dialokasikan anggaran sebesar Rp. 403.344.000. Namun, sejalan dengan kebijakan efisiensi anggaran berdasarkan instruksi Presiden, dilakukan penyesuaian pada beberapa rekening belanja, meliputi: (1) cetak, (2) makan minum rapat, (3) sewa hotel, (4) perjalanan dinas. Setelah penyesuaian, pagu anggaran menjadi Rp.

348.258.000. Sampai dengan akhir Triwulan I, belum terdapat realisasi kegiatan baik secara fisik maupun keuangan. Hal ini dikarenakan kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD baru dijadwalkan akan dilaksanakan mulai Triwulan III tahun anggaran berjalan.

h. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD

Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 memiliki indikator kinerja berupa Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD sebanyak 2 (dua) dokumen yaitu Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan dan Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) Perubahan. Kegiatan ini awalnya dialokasikan anggaran sebesar Rp. 399.276.000. Namun, sejalan dengan kebijakan efisiensi anggaran berdasarkan instruksi Presiden, dilakukan penyesuaian pada beberapa rekening belanja, meliputi: (1) cetak, (2) makan minum rapat, (3) sewa hotel, (4) perjalanan dinas. Setelah penyesuaian, pagu anggaran menjadi Rp. 361.851.000. Pada Triwulan I, sub kegiatan ini telah terealisasi sebesar Rp14.780.000 atau sebesar 4,08% dari total pagu anggaran. Realisasi tersebut digunakan untuk belanja bahan cetak buku terkait Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun 2025 Nomor 5 tanggal 6 Maret 2025, yang telah disampaikan kepada DPRD Kabupaten Tangerang dan BPKAD Provinsi Banten.

i. Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran

Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran Tahun Anggara 2025 memiliki indikator kinerja berupa Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran sebanyak 4 (empat) dokumen yaitu dokumen SBU, TPBK, Perjalanan Dinas dan ASB. Kegiatan ini awalnya dialokasikan anggaran sebesar Rp. 432.372.000. Namun, sejalan dengan kebijakan efisiensi anggaran berdasarkan instruksi Presiden, dilakukan penyesuaian pada beberapa rekening belanja, meliputi: (1) cetak, (2) makan minum rapat, (3) sewa hotel, (4) perjalanan dinas. Setelah penyesuaian, pagu anggaran menjadi Rp. 286.591.600. Pada Triwulan I, sub kegiatan ini telah terealisasi sebesar Rp. 38.152.800 atau sebesar 13,31% dari total pagu anggaran. Realisasi tersebut digunakan untuk rapat konsinyering usulan SBU, rapat konfirmasi permohonan SBU 2026, rapat penyusunan SBU 2026 dan rapat finalisasi SBU 2026.

j. Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah

Sub kegiatan Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggara 2025 memiliki indikator kinerja berupa Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah sebanyak 4 (empat) dokumen yaitu Dokumen laporan hasil rapat TAPD sebanyak 4 Triwulan. Kegiatan ini awalnya dialokasikan

anggaran sebesar Rp. 46.235.000. Namun, sejalan dengan kebijakan efisiensi anggaran berdasarkan instruksi Presiden, dilakukan penyesuaian pada beberapa rekening belanja, meliputi: (1) cetak, (2) makan minum rapat, (3) sewa hotel, (4) perjalanan dinas. Setelah penyesuaian, pagu anggaran menjadi Rp. 35.723.000. Sampai dengan akhir Triwulan I, belum terdapat realisasi kegiatan namun rapat TAPD Triwulan I tetap dilaksanakan di ruang kerja Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang dan difasilitasi oleh bagian Sekretaris Daerah.

2. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah

Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah pada Tahun Anggaran 2025 memiliki output berupa Jumlah Dokumen Pengelolaan Perbendaharaan dan Kas Daerah dengan target sebanyak 28 dokumen. Target tersebut dilaksanakan melalui sejumlah sub kegiatan yang secara keseluruhan didukung oleh pagu anggaran sebesar 1.116.282.000. Selanjutnya, capaian output, realisasi keuangan, serta realisasi fisik dari masing-masing sub kegiatan akan dijabarkan pada bagian berikut:

a. Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah

Sub kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah Tahun Anggaran 2025 memiliki indikator kinerja berupa Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah dengan target sebanyak 4 Dokumen yaitu dokumen rekapitulasi gaji untuk 4 Triwulan. Kegiatan ini awalnya dialokasikan anggaran sebesar Rp. 702.848.000. Namun, sejalan dengan kebijakan efisiensi anggaran berdasarkan instruksi Presiden, dilakukan penyesuaian pada beberapa rekening belanja, meliputi: (1) cetak, (2) makan minum rapat, dan (3) sewa hotel. Setelah penyesuaian, pagu anggaran menjadi Rp. 668.820.000. Pada Triwulan I, sub kegiatan ini telah terealisasi sebesar Rp.53.728.000 atau 8,03% dari total anggaran. Adapun output yang telah dihasilkan adalah Dokumen Rekapitulasi Gaji Triwulan I.

b. Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya

Sub kegiatan Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya Tahun Anggaran 2025 memiliki indikator kinerja berupa Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya dengan target sebanyak 20 dokumen yaitu DAK Fisik (4 Triwulan), DAK Non Fisik (4 Triwulan), DAU (4 Triwulan), BanProv (4 Triwulan) dan BHPP (4 Triwulan). Kegiatan ini awalnya dialokasikan anggaran sebesar Rp. 176.734.000. Namun, sejalan dengan kebijakan efisiensi anggaran berdasarkan instruksi Presiden, dilakukan penyesuaian pada beberapa rekening belanja, meliputi: (1) cetak, (2) makan minum rapat, (3) sewa hotel, dan (4) jasa kantor. Setelah penyesuaian, pagu anggaran menjadi Rp. 126.070.000. Pada Triwulan I, sub kegiatan ini telah terealisasi sebesar Rp. 15.534.000 atau 12,32% dari total anggaran.

c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah Tahun Anggaran 2025 memiliki indikator kinerja berupa Jumlah dokumen yang dihasilkan dari Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) sebanyak 4 Laporan antara lain: 1) Laporan BKU; 2) Laporan Pajak; 3) Laporan SPD; dan 4) Laporan STS dari masing-masing Triwulan. Kegiatan ini awalnya dialokasikan anggaran sebesar Rp. 396.460.000. Namun, sejalan dengan kebijakan efisiensi anggaran berdasarkan instruksi Presiden, dilakukan penyesuaian pada beberapa rekening belanja, meliputi: (1) cetak, (2) makan minum rapat, (3) sewa hotel, dan (4) jasa kantor. Setelah penyesuaian, pagu anggaran menjadi Rp. 321.392.000. Pada Triwulan I, sub kegiatan ini telah terealisasi sebesar Rp. 35,761,000 atau 11,13% dari total anggaran. Output yang telah dihasilkan pada Triwulan I sebanyak 4 Laporan yaitu laporan BKU Triwulan I, laporan pajak Triwulan I, laporan SPD Triwulan I dan laporan STS Triwulan I.

3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah pada Tahun Anggaran 2025 memiliki output berupa Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Akuntansi sebanyak 12 dokumen. Target tersebut dilaksanakan melalui sejumlah sub kegiatan yang secara keseluruhan didukung oleh pagu anggaran sebesar 1.256.282.200. Selanjutnya, capaian output, realisasi keuangan, serta realisasi fisik dari masing-masing sub kegiatan akan dijabarkan pada bagian berikut:

a. Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran

Sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran Tahun Anggaran 2025 memiliki indikator kinerja berupa Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran sebanyak 6 Laporan antara lain Laporan Hasil Verfal SPJ (Triwulan I,II dan III) dan Laporan Penyerapan Anggaran (Triwulan I,II dan III). Kegiatan ini awalnya dialokasikan anggaran sebesar Rp. 38.568.000. Namun, sejalan dengan kebijakan efisiensi anggaran berdasarkan instruksi Presiden, dilakukan penyesuaian pada beberapa rekening belanja, meliputi: (1) cetak, dan (2) makan minum rapat. Setelah penyesuaian, pagu anggaran menjadi Rp. 28.064.000. Sampai dengan akhir Triwulan I, belum terdapat realisasi kegiatan baik secara fisik maupun keuangan. Hal ini dikarenakan kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran baru dijadwalkan akan dilaksanakan mulai Triwulan II tahun anggaran berjalan.

b. Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Sub kegiatan Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025 memiliki indikator kinerja berupa Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Pemerintah Daerah sebanyak 2 laporan antara lain Laporan LKPD Semester 1 dan Laporan LKPD Akhir tahun. Kegiatan ini awalnya dialokasikan anggaran sebesar Rp. 204.307.600. Namun, sejalan dengan kebijakan efisiensi anggaran berdasarkan instruksi Presiden, dilakukan penyesuaian pada beberapa rekening belanja, meliputi: (1) cetak, (2) makan minum rapat, (3) Honorarium, (4) Tenaga Ahl, dan (5) Sewa Hotel. Setelah penyesuaian, pagu anggaran menjadi Rp. 174.912.000. Pada Triwulan I, sub kegiatan ini telah terealisasi sebesar Rp. 155.692.000 atau 89,01% dari total anggaran. Output yang telah dihasilkan pada Triwulan I sebanyak 1 Laporan yaitu Laporan LKPD Akhir Tahun 2024.

c. Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota

Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 memiliki indikator kinerja berupa Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dengat target sebanyak 2 Dokumen yaitu Raperda dan Raperbup Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Kegiatan ini awalnya dialokasikan anggaran sebesar Rp. 134.280.000. Namun, sejalan dengan kebijakan efisiensi anggaran berdasarkan instruksi Presiden, dilakukan penyesuaian pada beberapa rekening belanja, meliputi: (1) cetak, (2) makan minum rapat, dan (3) Jasa Kantor. Setelah penyesuaian, pagu anggaran menjadi Rp. 98.494.000. Sampai dengan akhir Triwulan I, belum terdapat realisasi kegiatan baik secara fisik maupun keuangan. Hal ini dikarenakan kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota baru dijadwalkan akan dilaksanakan mulai Triwulan II tahun anggaran berjalan.

d. Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota

Sub kegiatan Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun

Anggaran 2025 memiliki indikator kinerja berupa Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota dengan target sebanyak 108 orang. Kegiatan ini awalnya dialokasikan anggaran sebesar Rp. 972.461.600. Namun, sejalan dengan kebijakan efisiensi anggaran berdasarkan instruksi Presiden, dilakukan penyesuaian pada beberapa rekening belanja, meliputi: (1) cetak, (2) makan minum rapat, dan (3) Jasa Kantor. Setelah penyesuaian, pagu anggaran menjadi Rp. 840.346.200. Sampai dengan akhir Triwulan I, belum terdapat realisasi kegiatan baik secara fisik maupun keuangan. Hal ini dikarenakan kegiatan Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota baru dijadwalkan akan dilaksanakan mulai Triwulan II tahun anggaran berjalan.

e. Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota

Sub kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 memiliki indikator kinerja berupa Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina dengan target sebanyak 44 Lembaga. Kegiatan ini awalnya dialokasikan anggaran sebesar Rp. 197.985.400. Namun, sejalan dengan kebijakan efisiensi anggaran berdasarkan instruksi Presiden, dilakukan penyesuaian pada beberapa rekening belanja, meliputi: (1) cetak, (2) makan minum rapat, (3) Jasa Kantor, dan (4) Sewa Hotel. Setelah penyesuaian, pagu anggaran menjadi Rp. 114.466.000. Sampai dengan akhir Triwulan I, belum terdapat realisasi kegiatan baik secara fisik maupun keuangan. Hal ini dikarenakan kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota baru dijadwalkan akan dilaksanakan mulai Triwulan IV tahun anggaran berjalan.

B. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pada Tahun Anggaran 2025, Program Pengelolaan Barang Milik Daerah menetapkan tiga indikator utama sebagai ukuran kinerja. Indikator pertama adalah Persentase capaian kinerja pengelolaan aset daerah, dengan target capaian sebesar 97%. Indikator kedua mencakup Persentase pemanfataan barang milik daerah yang digunausahakan, yang ditargetkan mencapai 85%. Pagu program Pengelolaan Barang Milik Daerah untuk Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 10.508.013.170. Adapun capaian realisasi keuangan dan output fisik dari kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam program tersebut akan diuraikan pada bagian berikut:

1. Pengelolaan Barang Milik Daerah

Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Tahun Anggaran 2025 memiliki output berupa Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pengelolaan Aset Daerah dengan target sebanyak 263 Dokumen.

Target tersebut dilaksanakan melalui sejumlah sub kegiatan yang secara keseluruhan didukung oleh pagu anggaran sebesar Rp. 10.508.013.170. Selanjutnya, capaian output, realisasi keuangan, serta realisasi fisik dari masing-masing sub kegiatan akan dijabarkan pada bagian berikut:

a. Penyusunan Standar Harga

Sub kegiatan Penyusunan Standar Harga Tahun Anggaran 2025 memiliki indikator kinerja berupa Jumlah Standar Harga yang Disusun sebanyak 4 dokumen yaitu dokumen SSH, SBU, ASB dan

HSPK. Kegiatan ini awalnya dialokasikan anggaran sebesar Rp. 642.444.400. Namun, sejalan dengan kebijakan efisiensi anggaran berdasarkan instruksi Presiden, dilakukan penyesuaian pada beberapa rekening belanja, meliputi: (1) cetak, (2) makan minum rapat, dan (3) Sewa Hotel. Setelah penyesuaian, pagu anggaran menjadi Rp. 534.168.800. Pada Triwulan I, sub kegiatan ini telah terealisasi sebesar Rp. 136.384.400 atau 25,53% dari total anggaran. Realisasi tersebut digunakan untuk melaksanakan rapat koordinasi tim penyusun bidang aset dengan tenaga ahli pendamping dan surveyor penyusunan standar harga satuan harga.

b. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah

Sub kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2025 memiliki indikator kinerja berupa Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah sebanyak 1 Dokumen. Kegiatan ini awalnya dialokasikan anggaran sebesar Rp.132.003.000. Namun, sejalan dengan kebijakan efisiensi anggaran berdasarkan instruksi Presiden, dilakukan penyesuaian pada beberapa rekening belanja, meliputi: (1) cetak, (2) makan minum rapat, dan (3) Sewa Hotel. Setelah penyesuaian, pagu anggaran menjadi Rp. 98.824.000. Pada Triwulan I, sub kegiatan ini telah terealisasi sebesar Rp. 8.100.000 atau 8,20% dari total anggaran. Realisasi tersebut digunakan untuk kegiatan validasi pada Aplikasi Atisibada dengan mengundang Pengurus Barang Daerah pada masing-masing OPD.

c. Penatausahaan Barang Milik Daerah

Sub kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2025 memiliki indikator kinerja berupa Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah sebanyak 1 Laporan. Kegiatan ini awalnya dialokasikan anggaran sebesar Rp. 761.480.000. Namun, sejalan dengan kebijakan efisiensi anggaran berdasarkan instruksi Presiden, dilakukan penyesuaian pada beberapa rekening belanja, meliputi: (1) cetak, (2) makan minum rapat, (3) Jasa Kantor, dan (4) Sewa Hotel. Setelah penyesuaian, pagu anggaran menjadi Rp. 711.324.000. Pada Triwulan I, sub kegiatan ini telah terealisasi sebesar Rp. 187.640.000 atau 24,64% dari total anggaran. Realisasi tersebut digunakan untuk kegaitan Rapat Koordinasi dan Penyusunan Indeks Penglolaan Aset, penghapusan, dan konsinyering yang termasuk didalamnya jasa tenaga ahli untuk pemelihaan aplikasi penatausahaan BMD dan jasa tenaga ahli KJPP.

d. Pengamanan Barang Milik Daerah

Sub kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran memiliki indikator kinerja berupa Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah dengan target sebanyak 250 Laporan yang merupakan proses pembuatan sertifikasi tanah milik pemerintah daerah. Kegiatan ini awalnya dialokasikan anggaran sebesar Rp. 7.884.770.200. Namun, sejalan dengan kebijakan efisiensi anggaran berdasarkan instruksi Presiden, dilakukan penyesuaian pada beberapa rekening belanja, meliputi: (1) cetak, (2) makan minum rapat, (3) Jasa Kantor, dan (4) Sewa Hotel. Setelah penyesuaian, pagu anggaran menjadi Rp. 7.788.082.030. Pada

Triwulan I, sub kegiatan ini telah terealisasi sebesar Rp. 1.239.558.680 atau 15,92% dari total anggaran. Realisasi tersebut digunakan untuk kegiatan pengukuran, monitoring, pengawasan dan pengendalian BMD serta koordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Tangerang.

e. Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah

Sub kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2025 memiliki inidikator kinerja berupa Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan target sebanyak 1 Laporan. Kegiatan ini awalnya dialokasikan anggaran sebesar Rp. 338.240.000. Namun, sejalan dengan kebijakan efisiensi anggaran berdasarkan instruksi Presiden, dilakukan penyesuaian pada beberapa rekening belanja, meliputi: (1) cetak, (2) makan minum rapat, (3) Jasa Kantor, dan (4) Sewa Hotel. Setelah penyesuaian, pagu anggaran menjadi Rp. 310.204.960. Pada Triwulan I, sub kegiatan ini telah terealisasi sebesar Rp. 288.500.000 atau 93% dari total anggaran. Realisasi tersebut digunakan untuk kegiatan pemasangan patok serta monitoring pengawasan dan pengendalian BMD yang dilakukan oleh Operator Satgas.

f. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah

Sub kegiatan Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2025 memiliki indikator kinerja berupa Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah dengan target sebanyak 9 Dokumen antara lain: 1) Dokumen Penghapusan BMD (4 Dokumen); 2) Dokumen Satuan Tugas (1 Dokumen); dan 3) TPTGR (4 Dokumen). Kegiatan ini awalnya dialokasikan anggaran sebesar Rp. 717.321.380. Namun, sejalan dengan kebijakan efisiensi anggaran berdasarkan instruksi Presiden, dilakukan penyesuaian pada beberapa rekening belanja, meliputi: (1) cetak, (2) makan minum rapat, (3) Jasa Kantor, dan (4) Sewa Hotel. Setelah penyesuaian, pagu anggaran menjadi Rp. 677.302.340. Target kinerja sub kegiatan Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2025 adalah Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah sebanyak 9 dokumen antara lain: 1) Dokumen Penghapusan BMD (4 Dokumen); 2) Dokumen Satuan Tugas (1 Dokumen); dan 3) TPTGR (4 Dokumen), dengan capaian kinerja pada Triwulan IV sebesar 100%. Sub kegiatan ini mendapatkan anggaran sebesar Rp. 717.321.380, pagu murni Rp. 677.302.340. Pada Triwulan I, sub kegiatan ini telah terealisasi sebesar Rp. 183.750.000 atau 25,62% dari total anggaran. Realisasi tersebut digunakan untuk kegiatan pemasangan plang sebanyak 45 paket yang masing2 terdiri dari 2 unit plang yang dikerjakan selama 50 hari kalender.

g. Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah

Sub kegiatan Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2025 memiliki indikator kinerja berupa Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah sebanyak 1 Laporan. Kegiatan ini awalnya dialokasikan anggaran sebesar Rp. 405.262.000. Namun, sejalan dengan kebijakan efisiensi anggaran berdasarkan instruksi Presiden, dilakukan penyesuaian pada beberapa rekening belanja, meliputi: (1) cetak, (2) makan minum rapat, (3) Jasa Kantor, dan (4) Sewa Hotel. Setelah penyesuaian, pagu anggaran menjadi Rp. 297.932.000. Pada Triwulan I, sub kegiatan ini telah terealisasi sebesar Rp. 71.400.000 atau 23,91% dari total anggaran. Realisasi tersebut digunakan untuk kegiatan rekonsiliasi belanja modal dan belanja barang dan jasa Trwiulan IV Tahun 2024 serta penyusunan kerta kerja neraca aset tetap Triwulan I s/d Triwulan IV Tahun 2024 yang melibatkan seluruh OPD di Kabupaten Tangerang.

C. Pengelolaan Barang Milik Daerah (UPTD PP BMD)

Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah (UPT PPBMD) pada Tahun Anggaran 2025 memiliki output berupa Jumlah Barang Milik Daerah yang digunausahakan dengan target sebanyak 17 unit. Target tersebut dilaksanakan melalui sejumlah sub kegiatan yang secara keseluruhan didukung oleh pagu anggaran sebesar Rp. 2.439.160.275. Selanjutnya, capaian output, realisasi keuangan, serta realisasi fisik dari masing-masing sub kegiatan akan dijabarkan pada bagian berikut:

1. Pengelolaan Barang Milik Daerah (UPTD PP BMD)

Adapun capaian output dan realisasi anggaran pada masing-masing sub kegiatan antara lain:

a. Penatausahaan Barang Milik Daerah

Sub kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah (UPTD PP BMD) Tahun Anggaran 2025 memiliki indikator kinerja berupa Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah sebanyak 3 Laporan antara lain: 1) Laporan Target Capaian retribusi BMD; 2) Laporan Realisasi Capaian Retribusi BMD; dan 3) Lapaoran Data Kerjasama Sewa BMD. Kegiatan ini awalnya dialokasikan anggaran sebesar Rp. 433.220.000. Namun, sejalan dengan kebijakan efisiensi anggaran berdasarkan instruksi Presiden, dilakukan penyesuaian pada beberapa rekening belanja, meliputi: (1) cetak, (2) makan minum rapat, dan (3) Sewa Hotel. Setelah penyesuaian, pagu anggaran menjadi Rp. 371.398.400. Triwulan I, sub kegiatan ini telah terealisasi sebesar Rp. 4.794.000 atau 1,29% dari total anggaran.

b. Pengamanan Barang Milik Daerah

Sub kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2025 memiliki indikator kinerja berupa Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah sebanyak 2 Laporan antara lain Laporan Pengamanan Gudang BMD dan Laporan Pengamanan BMD yang dikerjasamakan. Kegiatan ini awalnya dialokasikan anggaran sebesar Rp. 249.892.400. Namun, sejalan dengan kebijakan efisiensi anggaran berdasarkan instruksi Presiden, dilakukan penyesuaian pada beberapa rekening belanja, meliputi: (1) cetak, (2) makan minum rapat, dan (3) Sewa Hotel. Setelah penyesuaian, pagu anggaran menjadi Rp. 201.128.400. Triwulan I,

sub kegiatan ini telah terealisasi sebesar Rp. 8.188.000 atau 4,07% dari total anggaran.

c. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah

Sub kegiatan Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2025 memiliki indikator kinerja berupa Jumlah dokumen hasil optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah sebanyak 2 Dokumen antara lain Dokumen Data BMD di Gudang UPTD PP BMD dan Dokumen Data Optimalisasi BMD yang belum dikerjasamakan. Kegiatan ini awalnya dialokasikan anggaran sebesar Rp. 1.993.635.475. Namun, sejalan dengan kebijakan efisiensi anggaran berdasarkan instruksi Presiden, dilakukan penyesuaian pada beberapa rekening belanja, meliputi: (1) cetak, (2) makan minum rapat, dan (3) Sewa Hotel. Setelah penyesuaian, pagu anggaran menjadi Rp. 1.866.633.475. Triwulan I, sub kegiatan ini telah terealisasi sebesar Rp. 208.636.500 atau 11,18% dari total anggaran

D. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Pada Tahun Anggaran 2025, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota memiliki indikator utama sebagai ukuran kinerja yaitu Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan yang ditargetkan mencapai 100%. Pagu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota untuk Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 28.473.269.179. Adapun capaian realisasi keuangan dan output fisik dari kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam program tersebut akan diuraikan pada bagian berikut:

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah pada Tahun Anggaran 2025 memiliki output berupa Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebanyak 22 Dokumen. Target tersebut dilaksanakan melalui sejumlah sub kegiatan yang secara keseluruhan didukung oleh pagu anggaran sebesar Rp. 340.213.800. Selanjutnya, capaian output, realisasi keuangan, serta realisasi fisik dari masing-masing sub kegiatan akan dijabarkan pada bagian berikut:

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2025 memiliki target indikator berupa Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan target sebanyak 11 Dokumen antara lain: 1) RKA; 2) RKA Perubahan; 3) DPA; 4) DPA Perubahan; 5) Rencana Kerja; 6) Rencana Kerja Perubahan; 7) Forum OPD; 8) Perjanjian Kinerja; 9) Perjanjian Kinerja Perubahan; dan 10) Rencana Aksi. Kegiatan ini awalnya dialokasikan anggaran sebesar Rp. 282.071.000. Namun, sejalan dengan kebijakan efisiensi anggaran berdasarkan instruksi Presiden, dilakukan penyesuaian pada beberapa rekening belanja, meliputi: (1) cetak, (2) makan minum rapat, (3) Jasa Kantor, dan (4) Sewa Hotel. Setelah

penyesuaian, pagu anggaran menjadi Rp. 210.290.000. Sub kegiatan ini mendapatkan anggaran sebesar Rp. 210.290.000, pagu murni Rp. 282.071.000. Pada Triwulan I, sub kegiatan ini telah terealisasi sebesar Rp. 32.440.000 atau 15,43% dari total anggaran. Output yang telah dihasilkan sebanyak 3 Dokumen antara lain Dokumen Rencana Aksi BPKAD Tahun 2025, Dokumen Perjanjian Kinerja 2025 dan Dokumen Forum OPD 2025.

b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tahun Anggaran 2025 memiliki indikator kinerja berupa Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD sebanyak 1 Laporan. Kegiatan ini awalnya dialokasikan anggaran sebesar Rp. 83.811.400. Namun, sejalan dengan kebijakan efisiensi anggaran berdasarkan instruksi Presiden, dilakukan penyesuaian pada beberapa rekening belanja, meliputi: (1) cetak, dan (4) Sewa Hotel. Setelah penyesuaian, pagu anggaran menjadi Rp. 67.757.800. Pada Triwulan I, sub kegiatan ini telah terealisasi sebesar Rp. 61.729.000 atau 91,2% dari total anggaran. Output yang telah dihasilkan sebanyak 1 Laporan yaitu Laporan LKIP Tahun 2024.

c. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025 memiliki indikator kinerja berupa Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan target sebanyak 10 Laporan antara lain: 1) Monitoring dan Evaluasi TW I; 2) Monitoring dan Evaluasi TW II; 3) Monitoring dan Evaluasi TW III; 4) Monitoring dan Evaluasi TW IV; 5) Manajemen Risiko TW I; 6) Manajemen Risiko TW II; 7) Manajemen Risiko TW III; 8) Manajemen Risiko TWI IV; 9) Data Pembangunan Semester I; dan 10) ata Pembangunan Semester II. Kegiatan ini awalnya dialokasikan anggaran sebesar Rp. 88.160.000. Namun, sejalan dengan kebijakan efisiensi anggaran berdasarkan instruksi Presiden, dilakukan penyesuaian pada beberapa rekening belanja, meliputi: (1) cetak, dan (2) Sewa Hotel. Setelah penyesuaian, pagu anggaran menjadi Rp. 62.166.000. Sampai dengan akhir Triwulan I, belum terdapat realisasi kegiatan baik secara fisik maupun keuangan. Sub kegiatan ini baru melaksanakan tahap persiapan evaluasi berupa pembuatan target capaian output kegiatan per Triwulan untuk masing-masing bidang pada BPKAD.

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah pada Tahun Anggaran 2025 memiliki output berupa Jumlah dokumen dokumen adminstrasi keuangan sebanyak 35 Dokumen. Target tersebut dilaksanakan melalui sejumlah sub kegiatan yang secara keseluruhan didukung oleh pagu anggaran sebesar Rp. 19.411.997.849. Selanjutnya, capaian output, realisasi keuangan, serta realisasi fisik dari masing-masing sub kegiatan akan dijabarkan pada bagian berikut:

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Tahun Anggaran 2025 memiliki indikator kinerja Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN sebanyak 68 Orang. Kegiatan ini mendapatkan pagu sebesar Rp. 19.145.375.649. Pada Triwulan I, sub kegiatan ini telah terealisasi sebesar Rp. 4.708.720.497 atau 24,59% dari total anggaran.

b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Tahun Anggaran 2025 memiliki indikator kinerja berupa jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD sebanyak 5 Laporan, antara lain: 1) LRA; 2) LO; 3) LPE; 4) Neraca; dan 5) CALK. Kegiatan ini awalnya dialokasikan anggaran sebesar Rp. 88.160.000. Namun, sejalan dengan kebijakan efisiensi anggaran berdasarkan instruksi Presiden, dilakukan penyesuaian pada beberapa rekening belanja, meliputi: (1) cetak, (2) makan dan minum, (3) jasa kantor dan (4) Sewa Hotel. Setelah penyesuaian, pagu anggaran menjadi Rp. 62.166.000. Output yang telah dihasilkan pada Triwulan I sebanyak 5 Laporan yaitu Laporan LRA Tahun 2024, Laporan LO 2024, Laporan Neraca 2024 dan Laporan CALK 2024.

c. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggap Pemeriksaan

Sub kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggap Pemeriksaan Tahun Anggaran 2025 memiliki indikator kinerja berupa jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan sebanyak 2 dokumen yaitu Dokumen Tanggapan BPK dan Dokumen Tanggapan Inspektorat. Kegiatan ini awalnya dialokasikan anggaran sebesar Rp. 88.160.000. Namun, sejalan dengan kebijakan efisiensi anggaran berdasarkan instruksi Presiden, dilakukan penyesuaian pada beberapa rekening belanja, meliputi: (1) cetak, (2) makan dan minum, (3) jasa kantor dan (4) Sewa Hotel. Setelah penyesuaian, pagu anggaran menjadi Rp. 62.166.000. Pada Triwulan I, sub kegiatan ini telah terealisasi sebesar Rp. 11.730.000 atau 99,92% dari total anggaran. Output dokumen bahan tanggap pemeriksaan BPK dan Inspektorat telah di selesaikan di Triwulan I.

d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Tahun Anggaran 2025 memiliki indikator kinerja berupa Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dengan target sebanyak 12 Dokumen antara lain: SPJ Fungsional TW I s.d TW III (3 Laporan); Penyerapan Anggaran TW I s.d TW III (3 Laporan); Laporan PAD TW I s.d TW III (3 Laporan); LRA Semester I; LO

Semester I; LPE Semester I; dan Neraca Semester I. Kegiatan ini awalnya dialokasikan anggaran sebesar Rp. 188.768.000. Namun, sejalan dengan kebijakan efisiensi anggaran berdasarkan instruksi Presiden, dilakukan penyesuaian pada beberapa rekening belanja, meliputi: (1) cetak, (2) makan dan minum, (3) jasa kantor dan (4) Sewa Hotel. Setelah penyesuaian, pagu anggaran menjadi Rp. 141.076.000. Pada Triwulan I, sub kegiatan ini telah terealisasi sebesar Rp. 7.300.000 atau 5,17% dari total anggaran. Realisasi tersebut digunakan untuk kegiatan rapat teknis penyerapan anggaran dan koordinasi pelaporan pajak bulanan yang mengundang PPTK.

e. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

Sub kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2025 memiliki indikator kinerja berupa Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran dengan target sebanyak 2 Dokumen yaitu BA rekon belanja SKPKD dan BA rekon pendapatan SKPKD. Kegiatan ini awalnya dialokasikan anggaran sebesar Rp. 120.044.000. Namun, sejalan dengan kebijakan efisiensi anggaran berdasarkan instruksi Presiden, dilakukan penyesuaian pada beberapa rekening belanja, meliputi: (1) cetak, (2) makan dan minum, (3) jasa kantor dan (4) Sewa Hotel. Setelah penyesuaian, pagu anggaran menjadi Rp. 87.343.000. Triwulan I, sub kegiatan ini telah terealisasi sebesar Rp. 2.190.000 atau 2,51% dari total anggaran. Realisasi tersebut digunakan untuk Rapat Evaluasi Laporan Keuangan SKPKD Triwulan I dengan mengundang OPT yang memanfaatkan BTT dan bantuan keuangan.

3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah pada Tahun Anggaran 2025 memiliki output berupa Jumlah dokumen Pembinaan Pegawai sebanyak 2 Dokumen. Target tersebut dilaksanakan melalui sejumlah sub kegiatan yang secara keseluruhan didukung oleh pagu anggaran sebesar Rp. 358.552.000. Selanjutnya, capaian output, realisasi keuangan, serta realisasi fisik dari masing-masing sub kegiatan akan dijabarkan pada bagian berikut:

a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya

Sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Tahun Anggaran 2025 memiliki indikator kinerja berupa Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan sebanyak 180 paket untuk seragam PDH putih ASN dan Non ASN. Sub kegiatan ini mendapatkan anggaran sebesar Rp. 146.340.000 dan pada Triwulan I telah direalisasikan sebesar Rp. 106.210.000 atau 72,58% dari total anggaran. Output yang dihasilkan pada Triwulan I yaitu seragam PDH putih sebanyak 172 paket (pasang) sesuai jumlah pegawaw PNS dan Non PNS di BPKAD.

b. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Tahun Anggaran 2025 memiliki indikator kinerja berupa Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dengan target sebanyak 128 Orang (ASN dan Non ASN). Kegiatan ini awalnya dialokasikan anggaran sebesar Rp. 241.916.000. Namun, sejalan dengan kebijakan efisiensi anggaran berdasarkan instruksi Presiden, dilakukan penyesuaian pada beberapa rekening belanja, meliputi: (1) jasa kantor dan (2) Sewa Hotel. Setelah penyesuaian, pagu anggaran menjadi Rp. 212.212.000. Triwulan I, sub kegiatan ini telah terealisasi sebesar Rp. 43.500.000 atau 20,50% dari total anggaran. Realisasi tersebut digunakan untuk pelaksanaan Bimbingan Teknis Microsoft Office (Begin to Intermediate) untuk 15 orang PNS BPKAD.

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah pada Tahun Anggaran 2025 memiliki output berupa Jumlah dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah sebanyak 8 Dokumen. Target tersebut dilaksanakan melalui sejumlah sub kegiatan yang secara keseluruhan didukung oleh pagu anggaran sebesar Rp. 3.111.165.600. Selanjutnya, capaian output, realisasi keuangan, serta realisasi fisik dari masing-masing sub kegiatan akan dijabarkan pada bagian berikut:

a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tahun Anggaran 2025 memiliki indikator kinerja berupa Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan sebanyak 2 paket pembelian komponen listrik dan paket instalasi listrik. Sub kegiatan ini mendapatkan anggaran sebesar Rp. 136.680.000 dan pada Triwulan I telah direalisasikan sebesar Rp. 77.539.340 atau sebesar 56,73% dari total anggaran. Realisasi tersebut digunakan untuk pemeliharaan jaringan Listrik dan belanja bahan alat Listrik untuk kegiatan kantor.

b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tahun Anggaran 2025 memiliki indikator kinerja berupa Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan dengan target sebanyak 8 paket. Sub kegiatan ini mendapatkan pagu sebesar Rp. 1.440.984.800 dan pada Triwulan I telah direalisasikan sebesar Rp. 1.185.800.000 atau 82,29% dari total anggaran. Capaian output yang dihasilkan pada Triwulan I sebanyak 7 paket antara lain: Paket penyediaan peralatan Keyboard, Genset, AC, TV, Sound System, Laptop dan Printer.

c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Sub kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tahun Anggaran 2025 memiliki indikator kinerja berupa Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan dengan target

sebanyak 3 paket antara lain: 1) Bahan Kimia; 2) Bahan Lainnya; dan 3) Perabot Kantor yang ada pada tiap triwulan. Sub kegiatan ini mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp. 270.743.800 dana pada Triwulan I telah direalisasikan sebesar Rp. 78.980.592 atau 29,17% dari total anggaran. Output yang telah dihasilkan pada Triwulan I sebanyak 2 paket antara lain paket alat bahan pembersih (bahan kimia) dan penyediaan mebel (perabot kantor).

d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tahun Anggaran 2025 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan dengan target sebanyan 4 paket antara lain: 1) ATK; 2) Kertas dan Cover; 3) Benda Pos; 4) Bahan Komputer (Tinta). Sub kegiatan ini mendapatka anggaran sebesar Rp. 264.693.400 dan pada Triwulan I telah direalisasikan sebesar Rp. 238.824.000 atau 90,23% dari total anggaran. Ouput yang dihasilkan pada Triwulan I sebanyak 4 paket penyediaan bahan logistic berupa ATK, kertas dan cover, benda pos dan tinta.

e. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tahun Anggaran 2025 memiliki indikator kinerja berupa Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan dengan target sebanyak 1 paket yaitu paket belanja bahan cetak. Sub kegiatan ini mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp. 132.310.000 dan pada Triwulan I telah direalisasikan sebesar Rp. 120.425.000 atau 91,02% dari total anggaran. Output yang dihasilkan pad Triwulan I berupa penyediaan barang cetakan dan penggandaan sebanyak 1 paket.

f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Tahun Anggarana 2025 memiliki indikator kinerja berupa Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan dengan target sebanyak 1 paket untuk belanja media cetak (koran) setiap bulan. Sub kegiatan ini mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp. Rp.23.300.000 dan pada Triwulan I telah direalisasikan sebesar Rp. 5.817.000 atau 24,97% dari total anggaran. Output yang dihasilkan pad Triwulan I antara lain dokumen bahan bacaan yang disediakan pada bulan Januari sampai dengan Maret 2025 masing-masing 1 paket setiap bulannya.

g. Fasilitasi Kunjungan Tamu

Sub kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu Tahun Anggaran 2025 memiliki indikator kinerja berupa Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu dengan target sebanyak 11 laporan antara lain laporan penyediaan makan minum untuk 1 tahun di luar bulan Ramadhan. Kegiatan ini awalnya dialokasikan anggaran sebesar Rp. Rp. 285.000.000. Namun, sejalan dengan kebijakan efisiensi anggaran berdasarkan instruksi Presiden, dilakukan penyesuaian pada belanja makan minum rapat sehingga setelah penyesuaian, pagu anggaran menjadi Rp. 212.212.000. Pada

Triwulan I sub kegiatan ini telah direalisasikan sebesar Rp. 39.384.000 atau 17,11% dari total anggaran. Output yang dihaslikan pada Triwulan I sebanyak 2 lapoan fasilitas kunjungan tamu untuk bulan Januari dan Februari.

h. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Tahun Anggaran 2025 memiliki indikator kinerja berupa Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan target sebanyak 12 Laporan. Kegiatan ini awalnya dialokasikan anggaran sebesar Rp. Rp. 1.236.437.600. Namun, sejalan dengan kebijakan efisiensi anggaran berdasarkan instruksi Presiden, dilakukan penyesuaian pada rekening belanja sewa hotel dan perjalanan dinas sehingga setelah penyesuaian, pagu anggaran menjadi Rp. 212.212.000. Pada Triwulan I sub kegiatan ini telah direalisasikan sebesar Rp. 109.850.000 atau sebesar 17,94% dari total anggaran. Output yang telah dihasilkan pada Triwulan I berupa penyelenggaraan rapat koordinasi sebanyak 3 laporan untuk pelaksaanaan masing-masing pada bulan Januari sampai dengan Maret 2025.

5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Tahun Anggaran 2025 memiliki output berupa Jumlah dokumen Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan target sebanyak 2 Dokumen. Target tersebut dilaksanakan melalui sejumlah sub kegiatan yang secara keseluruhan didukung oleh pagu anggaran sebesar Rp. 2.036.546.000. Selanjutnya, capaian output, realisasi keuangan, serta realisasi fisik dari masing-masing sub kegiatan akan dijabarkan pada bagian berikut:

a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tahun Anggaran 2025 memiliki indikator kinerja berupa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan dengan target sebanyak 12 Laporan. Sub kegiatan ini mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp. 39.204.000 dan pada Triwulan I telah direalisasikan sebesar Rp. 6.660.000 atau 16,99% dari total anggaran. Output yang telah dihasilkan pad Triwulan I antara lain Laporan penyediaan Jasa kommunikasi, sumber daya air dan Listrik untuk periode Januari sampai dengan Maret 2025 sebanyak 3 lapora.

b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Tahun Anggaran 2025 memiliki indikator kinerja berupa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan dengan target sebanyak 12 Laporan. Sub kegiatan ini awalnya dialokasikan anggaran sebesar Rp. Rp. 2.138.096.000. Namun, sejalan dengan kebijakan efisiensi anggaran berdasarkan instruksi Presiden, dilakukan penyesuaian pada rekening belanja sewa hotel dan setelah penyesuaian pagu anggaran menjadi Rp. 1.997.342.000. Pada Triwulan I sub kegiatan ini telah merealisasikan sebesar Rp. 431.679.000 atau 21,61% dari total

anggaran. Output yang dihasilkan pada Triwulan I yaitu laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor selama periode Januari sampai dengan Maret 2025 sebanyak 3 Laporan.

6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Tahun Anggaran 2025 memiliki output berupa Jumlah dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan target sebanyak 5 Dokumen. Target tersebut dilaksanakan melalui sejumlah sub kegiatan yang secara keseluruhan didukung oleh pagu anggaran sebesar Rp. 3.214.793.930. Selanjutnya, capaian output, realisasi keuangan, serta realisasi fisik dari masing-masing sub kegiatan akan dijabarkan pada bagian berikut:

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Tahun Anggaran 2025 memiliki indikator kinerja berupa Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya dengan target sebanyak 37 unit kendaraan. Sub kegiatan ini mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp. 632.133.930 dan pada Triwulan I telah direalisasikan sebesar Rp. 106.292.431 atau 16,81% dari total anggaran. Realisasi tersebut untuk pemeliharaan kendaraan roda 4 dan roda 2 di BPKAD serta biaya operasional BBM.

b. Pemeliharaan Mebel

Sub kegiatan Pemeliharaan Mebel Tahun Anggaran 2025 memiliki indikator kinerja berupa Jumlah Mebel yang Dipelihara dengan target sebanyak 42 unit. Sub kegiatan ini mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp. 56.200.000 dan sampai dengan akhir Triwulan I belum ada capaian realisasi keuangan maupun fisik dikarenakan sub kegiatan ini baru akan dilaksanakan di Triwulan IV.

c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Tahun Anggara 2025 memilili indikator kinerja berupa Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara dengan target sebanyak 10 uinit. Sub kegiatan ini mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp. 385.390.000 dan pada Triwulan I telah direalisasikan sebesar Rp. 92.360.816 atau 23,97% dari total anggaran. Output yang telah dihasilkan pada Triwulan I yaitu pemeliharaan peralatan dan mesin sebanyak 8 unit antara lain BBM Genset, mesin cetak, AC, CCTV, Proyektor, TV, Videotron dan Personal Computer.

d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya memiliki indikator kinerja berupa Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi dengan target sebanyak 3 unit yaitu: 1) Gedung BPKAD; 2) Gedung UPT; dan 3) Gedung Bizpoint. Sub

kegiatan ini mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp. 1.473.750.000 dan pada Triwulan I telah direalisasikan sebesar Rp. 502.150.000 atau 34,07% dari total anggaran. Output yang telah dihasilkan pada Triwulan I antara lain pemeliharaan/rehabilitais Gedung kantor sebanyak 1 unit yaitu Gedung BPKAD.

e. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Tahun Anggaran 2025 memiliki indikator kinerja berupa Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi dengan target sebanyak 3 unit. Sub kegiatan ini mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp. 667.320.000 dan pada Triwulan I telah direalisasikan sebesar Rp. 192.580.000 atau 28,86% dari total anggaran. Output yang dihasilkan pada Triwulan I yaitu Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor sebanyak 1 unit yaitu Gedung BPKAD.

Tabel 2.1

REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TRIWULAN I TAHUN 2024

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TANGERANG

SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2026		REALISASI AWAL CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH		TARGET KINERJA RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN I TAHUN 2025		TINGKAT REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN I TAHUN 2025		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025	
				FISIK	Rp	FISIK	Rp	FISIK	Rp	FISIK	Rp	FISIK	Rp	FISIK	Rp	FISIK	Rp
Meningkatnya Kinerja Keuangan dan Aset Daerah		**Rata rata dari persentase ketepatan pengalokasian anggaran belanja (belanja kesehatan, belanja pendidikan, infrastruktur, APIP dan Pelatihan) , ketepatan penyusunan APBD, kesesuaian waktu penyampaian Laporan Keuangan Daerah Kepada BPK, kecepatan dan ketepatan dokumen pencairan, ketepatan penyerapan anggaran sesuai dengan rencana pencairan**	**Persentase**	**98.67**				97.75	4,230,373,800	0	322,017,800	0	7.612041281				
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	**Persentase Kinerja Pengelolaan Anggaran Daerah**	**Persentase**	**98.5**				98.25	1,857,809,600	5	61,302,800	5.09	3.30				
		Persentase Kinerja Pengelolaan Akuntansi Daerah	**Persentase**	**97.5**				95	1,256,282,200	7	155,692,000	7.37	12.39				
		Persentase Kinerja Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	**Persentase**	**100**				100	1,116,282,000	14	105,023,000	14.00	9.41				
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	**Jumlah Dokumen Rencana Anggaran Daerah**	**Dokumen**	**72**		18		18	1,857,809,600	1	61,302,800	5.56	3.30	19		26.39	
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	**Dokumen**	**4**		1		1	178,325,000		0	0.00	0.00	1		25.00	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	**Dokumen**	**4**		1		1	175,395,000		0	0.00	0.00	1		25.00	

SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2026		REALISASI AWAL CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH		TARGET KINERJA RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN I TAHUN 2025		TINGKAT REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN I TAHUN 2025		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025	
				FISIK	Rp	FISIK	Rp	FISIK	Rp	FISIK	Rp	FISIK	Rp	FISIK	Rp	FISIK	Rp
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	**Dokumen**	**4**		1		1	176,124,000		0	0.00	0.00	1		25.00	
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	**Dokumen**	**4**		1		1	153,576,000		0	0.00	0.00	1		25.00	
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	**Dokumen**	**4**		1		1	72,048,000		8,370,000	0.00	11.62	1		25.00	
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	**Dokumen**	**4**		1		1	69,918,000		0	0.00	0.00	1		25.00	
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	**Dokumen**	**8**		2		2	348,258,000		0	0.00	0.00	2		25.00	
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	**Dokumen**	**8**		2		2	361,851,000		14,780,000	0.00	4.08	2		25.00	
	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	**Dokumen**	**16**		4		4	286,591,600		38,152,800	0.00	13.31	4		25.00	
	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	**Dokumen**	**16**		4		4	35,723,000	1	0	25.00	0.00	5		31.25	
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	**Jumlah Dokumen Pengelolaan Perbendaharaan dan Kas Daerah**	**Dokumen**	**112**		28		28	1,116,282,000	4	105,023,000	14.29	9.40828572	32		28.57	

SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2026		REALISASI AWAL CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH		TARGET KINERJA RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN I TAHUN 2025		TINGKAT REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN I TAHUN 2025		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025	
				FISIK	Rp	FISIK	Rp	FISIK	Rp	FISIK	Rp	FISIK	Rp	FISIK	Rp	FISIK	Rp
	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	**Dokumen**	**16**		4		4	668,820,000		53,728,000	0.00	8.03	4		25.00	
	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	**Dokumen**	**80**		20		20	126,070,000		15,534,000	0.00	12.32	20		25.00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	**Laporan**	**16**		4		4	321,392,000	4	35,761,000	100.00	11.13	8		50.00	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	**Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Akuntansi**	**Dokumen**	**48**		12		12	1,256,282,200	1	155,692,000	8.33	12.39	13		27.08	

SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2026		REALISASI AWAL CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH		TARGET KINERJA RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN I TAHUN 2025		TINGKAT REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN I TAHUN 2025		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025	
				FISIK	Rp	FISIK	Rp	FISIK	Rp	FISIK	Rp	FISIK	Rp	FISIK	Rp	FISIK	Rp
	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	**Laporan**	**24**		6		6	28,064,000		0	0.00	0.00	6		25.00	
	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Pemerintah Daerah	**Laporan**	**8**		2		2	174,912,000	1	155,692,000	50.00	89.01	3		37.50	
	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	**Dokumen**	**8**		2		2	98,494,000		0	0.00	0.00	2		25.00	
	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	**Orang**	**432**		108		108	840,346,200		0	0.00	0.00	108		25.00	
	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/ Kota	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	**Lembaga**	**176**		44		44	114,466,000		0	0.00	0.00	44		25.00	
Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Aset Daerah		**Persentase Meningkatnya Kinerja Kinerja Pengelolaan Aset Daerah**	**Persentase**	**95**										**0**		**0.00**	
	PROGRAM PENGELOLAAN	**Persentase capaian kinerja pengelolaan aset daerah**	**Persentase**	**100**				97	12,947,173,445		2,336,951,580	0.00	18.05	0		0.00	

SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2026		REALISASI AWAL CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH		TARGET KINERJA RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN I TAHUN 2025		TINGKAT REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN I TAHUN 2025		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025	
				FISIK	Rp	FISIK	Rp	FISIK	Rp	FISIK	Rp	FISIK	Rp	FISIK	Rp	FISIK	Rp
	BARANG MILIK DAERAH	**Persentase pemanfataan barang milik daerah yang digunausahakan**	**Persentase**	**90**				85						0		0.00	
	Pengelolaan Barang Milik Daerah	**Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pengelolaan Aset Daerah**	**Dokumen**	**789**		263		263	10,508,013,170		2,115,333,080	0.00	20.13	263		33.33	
	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	**Dokumen**	**12**		4		4	534,168,800		136,384,400	0.00	25.53	4		33.33	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	**Dokumen**	**4**		1		1	98,824,000		8,100,000	0.00	8.20	1		25.00	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	**Laporan**	**4**		1		1	761,480,000		187,640,000	0.00	24.64	1		25.00	
	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	**Laporan**	**1000**		250		250	7,788,082,030		1,239,558,680	0.00	15.92	250		25.00	
	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan dan pengendalian pengelolaan Barang Milik Daerah	**Laporan**	**4**		1		1	310,204,960		288,500,000	0.00	93.00	1		25.00	
	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen hasil optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	**Dokumen**	**36**		9		9	717,321,380		183,750,000	0.00	25.62	9		25.00	
	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	**Laporan**	**4**		1		1	297,932,000		71,400,000	0.00	23.97	1		25.00	
	Pengelolaan Barang Milik Daerah	**Jumlah Barang Milik Daerah yang digunausahakan**	**Unit**	**50**		17		17	2,439,160,275		221,618,500	0.00	9.09	17		34.00	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	**Laporan**	**9**		3		3	371,398,400		4,794,000	0.00	1.29	3		33.33	

SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2026		REALISASI AWAL CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH		TARGET KINERJA RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN I TAHUN 2025		TINGKAT REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN I TAHUN 2025		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025	
				FISIK	Rp	FISIK	Rp	FISIK	Rp	FISIK	Rp	FISIK	Rp	FISIK	Rp	FISIK	Rp
	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	**Laporan**	**6**		2		2	201,128,400		8,188,000	0.00	4.07	2		33.33	
	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen hasil optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	**Dokumen**	**6**		2		2	1,866,633,475		208,636,500	0.00	11.18	2		33.33	
Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas BPKAD		**Nilai AKIP BPKAD**	**Nilai**	**84.4**				**84.3**	**47,674,977,028**	**87.55**	**12,901,444,173**	**103.86**	**27.06**	**87.55**		**103.73**	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	**Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan**	**Persen**	**100**				100	47,674,977,028	25	12,901,444,173	25.00	27.06	25		25.00	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Dokumen**	**82**		22		22	19,541,921,649	4	4,812,810,497	18.18	24.63	26		31.71	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	**Dokumen**	**30**		11		11	67,757,800	3	61,729,000	27.27	91.10	14		46.67	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	**Laporan**	**4**		1		1	62,166,000	1	500,000	100.00	0.80	2		50.00	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Laporan**	**48**		10		10	19,411,997,849	-	4,750,581,497	0.00	24.47	0		0.00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen dokumen adminstrasi keuangan**	**Dokumen**	**99**		35		35	19,411,997,849	9	4,750,581,497	25.71	24.47	44		44.44	

SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2026		REALISASI AWAL CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH		TARGET KINERJA RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN I TAHUN 2025		TINGKAT REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN I TAHUN 2025		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025	
				FISIK	Rp	FISIK	Rp	FISIK	Rp	FISIK	Rp	FISIK	Rp	FISIK	Rp	FISIK	Rp
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	**Orang/bulan**	**292**		68		68	19,145,375,649	68	4,708,720,497	100.00	24.59	136		46.58	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	**Laporan**	**12**		5		5	26,464,200	5	20,641,000	100.00	78.00	10		83.33	
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	**Dokumen**	**6**		2		2	11,739,000	2	11,730,000	100.00	99.92	4		66.67	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	**Laporan**	**17**		12		12	141,076,000		7,300,000	0.00	5.17	12		70.59	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	**Dokumen**	**8**		2		2	87,343,000		2,190,000	0.00	2.51	2		25.00	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen Pembinaan Pegawai**	**Dokumen**	**4**		2		2	358,552,000		149,710,000	0.00	41.75	2		50.00	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	**Paket**	**300**		180		180	146,340,000	86	106,210,000	47.78	72.58	266		88.67	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	**Orang**	**292**		128		128	212,212,000	15	43,500,000	11.72	20.50	143		48.97	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Dokumen**	**32**		8		8	3,111,165,600		1,856,619,932	0.00	59.68	8		25.00	

SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2026		REALISASI AWAL CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH		TARGET KINERJA RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN I TAHUN 2025		TINGKAT REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN I TAHUN 2025		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025	
				FISIK	Rp	FISIK	Rp	FISIK	Rp	FISIK	Rp	FISIK	Rp	FISIK	Rp	FISIK	Rp
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	**Paket**	**8**		2		2	136,680,000	2	77,539,340	100.00	56.73	4		50.00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	**Paket**	**40**		8		8	1,440,984,800	7	1,185,800,000	87.50	82.29	15		37.50	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	**Paket**	**12**		3		3	270,743,800	2	78,980,592	66.67	29.17	5		41.67	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	**Paket**	**20**		4		4	264,693,400	4	238,824,000	100.00	90.23	8		40.00	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang Disediakan	**Paket**	**4**		1		1	132,310,000	1	120,425,000	100.00	91.02	2		50.00	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	**Paket**	**4**		1		1	23,300,000	1	5,817,000	100.00	24.97	2		50.00	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	**Laporan**	**44**		11		11	230,244,000	2	39,384,000	18.18	17.11	13		29.55	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	**Laporan**	**48**		12		12	612,209,600	3	109,850,000	25.00	17.94	15		31.25	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah dokumen Jasa Penunjang**	**Dokumen**	**8**		2		2	2,036,546,000		438,339,000	0.00	21.52	2		25.00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	**Laporan**	**48**		12		12	39,204,000	3	6,660,000	25.00	16.99	15		31.25	

SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2026		REALISASI AWAL CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH		TARGET KINERJA RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN I TAHUN 2025		TINGKAT REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN I TAHUN 2025		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025	
				FISIK	Rp	FISIK	Rp	FISIK	Rp	FISIK	Rp	FISIK	Rp	FISIK	Rp	FISIK	Rp
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang Disediakan	**Laporan**	**48**		12		12	1,997,342,000	3	431,679,000	25.00	21.61	15		31.25	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Dokumen**	**18**		5		5	3,214,793,930		893,383,247	0.00	27.79	5		27.78	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	**Unit**	**30**		27		37	632,133,930	37	106,292,431	100.00	16.81	64		213.33	
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	**Unit**	**30**		42		42	56,200,000		0	0.00	0.00	42		140.00	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah p\eralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	**Unit**	**148**		10		10	385,390,000	9	92,360,816	90.00	23.97	19		12.84	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	**Unit**	**196**		3		3	1,473,750,000	1	502,150,000	33.33	34.07	4		2.04	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	**Unit**	**8**		3		3	667,320,000	1	192,580,000	33.33	28.86	4		50.00	

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan BPKAD Kabupaten Tangerang

Adapun analisis terhadap capaian kinerja pelayanan Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Tangerang berdasarkan indikator kinerja sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 dan Renstra BPKAD Tahun 2024-2026 dapat dijelaskan melalui tabel berikut ini :

Tabel 2.2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SKPD
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TANGERANG

NO	INDIKATOR	SPM/ STANDAR NASIONAL NSPK	IKK	SATUAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH			CAPAIAN KINERJA	PROYEKSI	CATATAN ANALISIS
					2024	2025	2026	2024	2025	
1	Persentase Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah			**Peresentase**	96.83	97.75	98.67	**100,39**	**97.75**	
2	Persentase Meningkatnya Kinerja Kinerja Pengelolaan Aset Daerah			**Peresentase**	85	91	95	**87,50**	**91**	
3	Nilai AKIP BPKAD			**Nilai**	84,2	84,3	84,4	**81,20**	**84,3**	

2.3. Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Fungsi BPKAD Kabupaten Tangerang

Beberapa permasalahan yang terkait dengan tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Tangerang meliputi sebagai berikut:

1. Masih terdapat lahan yang digunakan oleh masyarakat dan pihak ketiga tanpa izin dari Pemda;
2. Pengurusan dokumen kepemilikan atas lahan milik Pemkab Tangerang terkendala oleh kelengkapan administrasi kepemilikan yang bersumber dari hibah masyarakat atau pihak ketiga maupun bersumber dari pembelian;
3. Belum tersedianya item belanja modal aset lainnya terakait pembuatan software Penyusunan Standard Harga Satuan Barang pada e-Katalog versi 6, yang merupakan sistem pengadaan wajib sesuai ketentuan terkini. Kondisi ini menyebabkan proses pengadaan tidak dapat dilanjutkan karena tidak memenuhi persyaratan sistem pengadaan yang berlaku. Hal ini berdampak pada tertundanya pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran pada sub kegiatan terkait, yang secara langsung memengaruhi capaian output pada periode Triwulan I.

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telahaan dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu strategis yang ada di bidang-bidang lingkup Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah , antara lain sebagai berikut:

1. Peningkatan tatakelola keuangan daerah;
2. Optimalisasi pengelolaan aset daerah;
3. Membangun tatakelola professional dalam pelayanan publik.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia secara berkelanjutan dengan tetap mempertimbangkan kemampuan Nasional dan sumber daya yang ada, maka perlu disusun Program Pembangunan Nasional (Propenas). Propenas merupakan rencana induk pembangunan perencanaan nasional hasil konsensus dan komitmen bersama masyarakat Indonesia yang memuat pencapaian visi dan misi bangsa. Dengan demikian, fungsi Propenas adalah untuk menyatukan pandangan dan derap langkah pemerintahan daerah di seluruh Indonesia dalam melaksanakan prioritas pembangunan selama lima tahun kedepan.

Untuk mendorong pelaksanaan fungsi tersebut perlu adanya desentralisasi keuangan yang memungkinkan daerah dapat melaksanakan kewenangannya dengan tetap menjamin stabilitas ekonomi makro, yang terintegrasi dengan kebijakan daerah dalam rangka mendukung terwujudnya anggaran pemerintah daerah yang dapat menunjang tugas-tugas desentralisasinya, khususnya yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar masyarakat. Sebagai penjabaran kebijakan program nasional dan untuk mensinergikan pelaksanaan program pembangunan daerah Pemerintah Kabupaten Tangerang menyusun Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan mengacu kepada Propenas dan Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Berdasarkan kedua hal tersebut, untuk mewujudkan keselarasan antara kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah, masing-masing Pemerintah Daerah harus menyusun Rencana Strategis (Renstra) dan Program Pembangunan Daerah (Propeda), walaupun dimungkinkan adanya perbedaan prioritas menurut kebutuhan daerah dengan pendekatan bersifat strategis dengan tujuan mewujudkan pemerintahan yang baik, memperkuat landasan pembangunan yang adil dan berkelanjutan serta meningkatkan pembangunan daerah. Untuk program kegiatan di daerah terlebih dahulu perlu dilakukan identifikasi terhadap kebijakan nasional**.**

3.2. Tujuan dan Sasaran

Perumusan tujuan dan sasaran pada periode pembangunan jangka menengah Kabupaten Tangerang pada periode sebelumnya mengacu pada visi dan misi Kepala Daerah terpilih. Berbeda dengan periode 2024-2026, sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru yang menyebabkan adanya perbedaan pendekatan perumusan tujuan dan sasaran karena tidak tersedianya visi dan misi Kepala Daerah. Sehingga untuk tetap menjaga keselarasan dengan dokumen perencanaan yang masih berlaku dan menjaga kesinambungan pembangunan antar periode, maka Pemerintah Kabupaten Tangerang merumuskan konsep Rencana Pembangunan Daerah 2024-2026 yang mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1) Misi RPJPD Pemerintah Kabupaten Tangerang 2005-2025;
2) 7 Agenda Pembangunan RPJMN 2020-2024;

3) Misi RPJMD Pemerintah Kabupaten Tangerang 2019-2023;
4) Isu-isu strategis Kabupaten Tangerang 2024-2026

Berdasarkan pertimbangan dari keempat muatan tersebut memberikan hasil identifikasi berupa empat aspek yang menjadi kesamaan dan dapat dijadikan sebagai fokus perencanaan periode selanjutnya. Keempat aspek tersebut yaitu :

1) Peningkatan Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia yang merupakan dimensi perencanaan yang berkaitan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Tangerang
2) Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi sebagai dimensi perencanaan yang berkaitan dengan kemajuan dan daya saing masyarakat dalam bidang ekonomi;
3) Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang merupakan dimensi perencanaan yang berupaya menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik;
4) Peningkatan Kualitas Infrastruktur sebagai dimensi perencanaan yang berfokus pada pembangunan infrastruktur yang terpadu serta berbasis pada ekonomi dan ekologi.

Keempat aspek tersebut menjadi dasar perumusan konsep Rencana Pembangunan Daerah yang diturunkan menjadi serangkaian rumusan tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Tangerang tahun 2024-2026, sebagai berikut :

1) Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia
2) Meningkatkan Kondusifitas Daerah dengan Pengembangan Perilaku Masyarakat yang Berlandaskan Keagamaan,Toleransi, dan Gotong Royong
3) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara komprehensif
4) Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik melalui Digitalisasi dan Integrasi Pelayanan Publik
5) Meningkatkan Pengembangan Infrastruktur yang Terpadu dan Berkelanjut

Penyusunan Renstra Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Tangerang, sehingga semua langkah-langkah yang disusun dalam Renstra Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah sejalan dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026.

Berdasarkan penjabaran atas tujuan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026, BPKAD berfokus pada tujuan dan sasaran Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik melalui Digitalisasi dan Integrasi Pelayanan Publik.

Pada tujuan ini terlihat dengan jelas peran serta dan keterlibatan Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah dalam mendukung tujuan dalam RPD Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026, sesuai dengan kewenangan yang telah menjadi tanggung jawab Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi. Selanjutnya Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah, dalam mewujudkan pencapaian tujuan 4 tersebut berfokus pada tujuan dan sasaran sebagai berikut:

Tujuan : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik melalui Digitalisasi dan Integrasi Pelayanan Publik dengan indikator:
- Indeks Reformasi Birokrasi

Sasaran : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah dengan indikator:
- Opini BPK

Selanjutnya BPKAD, dalam mewujudkan pencapaian Misi 4 tersebut berfokus pada tujuan dan sasaran sebagai berikut :

1. Tujuan : Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

   Untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan ini dapat diukur dengan indikator:
   Penilaian Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang, yaitu Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama Tahun 2024-2026.

   a) Sasaran : Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah
   Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator:
   Persentase Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan target pada tahun 2025 yaitu sebesar 97.75 Persen.

   b) Sasaran : Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Aset Daerah
   Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator:
   Persentase Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Aset Daerah, dengan target pada tahun 2025 yaitu sebesar 91.00 Persen.

2. Tujuan : Meningkatkan Kinerja Akuntabilitas BPKAD
   Untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan ini dapat diukur dengan indikator:
   Nilai AKIP BPKAD dengan target pada tahun 2025 yaitu sebesar 84,3

   a) Sasaran : Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas BPKAD
   Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator:
   Nilai AKIP BPKAD dengan target pada tahun 2025 yaitu sebesar 84,3.

Dengan sasaran dan indikator sasaran tersebut, maka BPKAD sebagai penyelenggara pelayanan bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah menitikberatkan seluruh program dan kegiatannya pada bidang-bidang guna mencapai indikator sasaran tersebut.

3.3. Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah, ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Adapun rumusan rencana program dan kegiatan yang direncanakan BPKAD Kabupaten Tangerang

untuk dilaksanakan pada tahun 2024 adalah terdiri dari 4 program, 10 kegiatan dan 46 sub kegiatan, dengan rincian sebagai berikut :

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**
   Program ini bertujuan untuk melaksanakan pemenuhan pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang, pemeliharaan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah di BPKAD. Pagu yang direncanakan pada APBD-P 2025 adalah sebesar Rp. 29.588.238.091,-.

2. **Program Pengelolaan Keuangan Daerah**
   Program ini bertujuan untuk mewujudkan mewujudkan perencanaan anggaran yang sesuai dengan tingkat kepatuhan rasio penganggaran, untuk mewujudkan kinerja penyelenggaraan akuntansi dan penyelesaian administrasi keuangan perbendaharaan daerah. Pagu yang direncanakan pada APBD-P 2025 adalah sebesar Rp 5.666.870.200,-.

3. **Program Pengelolaan Barang Milik Daerah**
   Program ini bertujuan untuk mewujudkan kinerja pengelolaan aset daerah. Pagu yang direncanakan pada APBD-P 2025 adalah sebesar Rp. 11.008.287170,-.

4. **Program Pengelolaan Barang Milik Daerah (Sub Unit UPT PP BMD)**
   Program ini bertujuan untuk mewujudkan penggunausahaan dan penyimpanan aset/barang daerah. Pagu yang direncanakan pada APBD-P 2025 adalah sebesar Rp. 2.255.735.275,-.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Proses penyusunan Renja Perubahan Tahun 2025 berlandaskan pada prioritas pembangunan yang mendukung pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana tertua ng pada RPD Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026. Rencana ini akan dijadikan sebagai pedoman bagi BPKAD Kabupaten Tangerang dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Penyusunan dokumen Renja Perubahan BPKAD Kabupaten Tangerang dilakukan dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2025 serta mempertimbangkan berbagai isu dan permasalahan yang mempengaruhi proses pelaksanaan Program dan Kegiatan BPKAD Kabupaten Tangerang pada tahun berjalan. Perubahan tersebut dilakukan untuk mengoptimalkan upaya pencapaian target dan sasaran Renstra BPKAD Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026.

Sesuai hasil evaluasi, Perubahan Renja BPKAD Kabupaten Tangerang tahun 2025, lebih memuat berbagai perubahan dan pergeseran anggaran tanpa adanya penambahan kegiatan yang ada. Pergeseran anggaran tersebut dilakukan akibat adanya perubahan volume kegiatan maupun optimaliasi pemanfaatan dana silpa kegiatan. Selain itu pergeseran anggaran juga dimaksudkan sebagai upaya optimalisasi pengelolaan anggaran BPKAD Kabupaten Tangerang sehingga seluruh target dan sasaran dapat tercapai.

Rumusan Program dan Kegiatan Perubahan BPKAD Kabupaten Tangerang Tahun 2025, terlihat dalam Tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel 4.1
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN TAHUN 2025
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN TANGERANG

KODE ANGGARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN,PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)		APBD		APBD-P		PERUBAHAN ANGGARAN	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025
				TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN		
5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan**	**Persen**	**100**	**29,531,282,579.00**	**100**	**29,588,238,091.00**	56,955,512.00	**32,014,113,364.00**
5.02.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Dokumen**	**20**	**454,042,400.00**	**22**	**395,184,800.00**	**(58,857,600.00)**	**877,524,652.00**
5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	10	282,071,000.00	11	241,767,000.00	(40,304,000.00)	330,165,198.00
5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	83,811,400.00	1	67,757,800.00	(16,053,600.00)	278,379,254.00
5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	10	88,160,000.00	10	85,660,000.00	(2,500,000.00)	268,980,200.00
5.02.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**-**		**-**	**19,506,740,649.00**	**-**	**19,754,113,771.00**	**247,373,122.00**	**19,401,297,616.00**
5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	68	19,145,375,649.00	68	19,426,899,371.00	281,523,722.00	19,021,143,156.00

KODE ANGGARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN,PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)		APBD		APBD-P		PERUBAHAN ANGGARAN	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025
				TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN		
5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	5	36,293,000.00	5	26,464,200.00	(9,828,800.00)	39,478,720.00
5.02.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	2	16,260,000.00	2	11,739,000.00	(4,521,000.00)	34,505,900.00
5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	188,768,000.00	12	174,135,200.00	(14,632,800.00)	243,838,940.00
5.02.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	2	120,044,000.00	2	114,876,000.00	(5,168,000.00)	62,330,900.00
5.02.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Pembinaan Pegawai**	**Dokumen**	**1**	**7,968,555,200.00**	**2**	**470,473,700.00**	**(7,498,081,500.00)**	**421,160,860.00**
5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	100	146,340,000.00	180	228,557,700.00	82,217,700.00	171,890,000.00
5.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	83	241,916,000.00	128	241,916,000.00	0.00	249,270,860.00
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen	8	3,790,149,600.00	8	3,890,165,690.00	100,016,090.00	3,269,208,975.00

KODE ANGGARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN,PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)		APBD		APBD-P		PERUBAHAN ANGGARAN	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025
				TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN		
5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	2	136,680,000.00	2	186,680,000.00	50,000,000.00	54,323,600.00
5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	1,440,984,800.00	8	1,851,975,890.00	410,991,090.00	1,096,253,405.00
5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	2	270,743,800.00	3	270,743,800.00	0.00	162,627,631.00
5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	264,693,400.00	4	396,286,400.00	131,593,000.00	304,483,154.00
5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	7	132,310,000.00	1	218,250,000.00	85,940,000.00	93,732,095.00
5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	23,300,000.00	1	23,300,000.00	0.00	35,665,476.00
5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	11	285,000,000.00	11	263,970,000.00	(21,030,000.00)	234,695,230.00
5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	1,236,437,600.00	12	678,959,600.00	(557,478,000.00)	1,287,428,384.00
5.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Dokumen Jasa Penunjang**	**Dokumen**	**2**	**2,177,300,000.00**	**2**	**2,096,503,600.00**	**(80,796,400.00)**	**1,746,044,399.00**
5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	Laporan	12	39,204,000.00	12	39,204,000.00	0.00	29,389,811.00

KODE ANGGARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN,PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)		APBD		APBD-P		PERUBAHAN ANGGARAN	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025
				TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN		
		Air dan Listrik yang Disediakan							
5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	2,138,096,000.00	12	2,057,299,600.00	(80,796,400.00)	1,716,654,588.00
5.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Dokumen**	**5**	**3,214,793,930.00**	**5**	**2,981,796,530.00**	**(232,997,400.00)**	**6,298,876,862.00**
5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	34	632,133,930.00	37	631,006,530.00	(1,127,400.00)	911,576,611.00
5.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	10	56,200,000.00	42	56,200,000.00	0.00	605,000,000.00
5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	362	385,390,000.00	10	385,390,000.00	0.00	470,110,598.00
5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	10	1,473,750,000.00	3	1,241,880,000.00	(231,870,000.00)	3,707,189,653.00
5.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	7	667,320,000.00	3	667,320,000.00	0.00	605,000,000.00

KODE ANGGARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN,PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)		APBD		APBD-P		PERUBAHAN ANGGARAN	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025
				TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN		
5.02.02	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**Persentase Pencapaian Waktu Pencairan Kas Daerah Berdasarkan Kesesuaian Dokumen**	**Persen**	**100**	**5,073,773,600.00**	**100**	**5,666,870,200.00**	**593,096,600.00**	**6,776,691,591.00**
		Pencairan Persentase Pencapaian Kinerja Akuntansi Daerah (Kesesuaian Waktu penyampaian Laporan Keuangan Daerah Kepada BPK, kesesuaian penyerapan anggaran terhadap rencana anggaran	**Persen**	**95**		**95**			
		Persentase Pencapaian Kinerja Anggaran Daerah (Rata rata dari Persentase pencapaian Mandatory Spending, Persentase Kesesuaian Waktu Penyusunan KUA PPAS, Persentase Kesesuaian Waktu penyampaian Nota Keuangan, Persentase Kesesuaian Waktu Perstujuan RAPBD)	**Persen**	**98.25**		**98.25**		
5.02.02.2.01	**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	**Jumlah Dokumen Rencana Anggaran Daerah**	**Dokumen**	**18**	**2,250,129,000.00**	**18**	**2,190,076,000.00**	**(60,053,000.00)**	**2,660,897,161.00**
5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Dokumen	1	213,914,000.00	1	178,325,000.00	(35,589,000.00)	234,911,717.00

KODE ANGGARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN,PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)		APBD		APBD-P		PERUBAHAN ANGGARAN	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025
				TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN		
5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Dokumen	1	209,594,000.00	1	175,395,000.00	(34,199,000.00)	268,331,026.00
5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	1	189,840,000.00	1	176,569,000.00	(13,271,000.00)	137,854,332.00
5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	1	186,060,000.00	1	153,576,000.00	(32,484,000.00)	137,854,332.00
5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	1	84,612,000.00	1	149,455,000.00	64,843,000.00	212,037,617.00
5.02.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	1	84,882,000.00	1	69,918,000.00	(14,964,000.00)	100,173,057.00
5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Dokumen	2	403,344,000.00	2	348,258,000.00	(55,086,000.00)	498,512,700.00
5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Dokumen	2	399,276,000.00	2	361,851,000.00	(37,425,000.00)	473,609,890.00

KODE ANGGARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN,PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)		APBD		APBD-P		PERUBAHAN ANGGARAN	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025
				TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN		
5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Dokumen	4	432,372,000.00	4	541,006,000.00	108,634,000.00	565,029,610.00
5.02.02.2.01.0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Dokumen	4	46,235,000.00	4	35,723,000.00	(10,512,000.00)	32,582,880.00
5.02.02.2.02	**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**Tersedianya Dokumen Pengelolaan Perbendaharaan dan Kas Daerah**	**Dokumen**	**28**	**1,276,042,000.00**	**28**	**1,220,586,000.00**	**(55,456,000.00)**	**2,257,251,368.00**
5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Dokumen	4	702,848,000.00	4	668,820,000.00	(34,028,000.00)	1,444,755,486.00
5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya		20	176,734,000.00	20	126,070,000.00	(50,664,000.00)	200,179,980.00

KODE ANGGARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN,PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)		APBD		APBD-P		PERUBAHAN ANGGARAN	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025
				TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN		
5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Laporan	4	396,460,000.00	4	425,696,000.00	29,236,000.00	612,315,902.00
5.02.02.2.03	**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	**Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Akuntansi**	**Dokumen**	**12**	**1,509,034,600.00**	**12**	**2,256,208,200.00**	**747,173,600.00**	**1,858,543,062.00**
5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Laporan	6	38,568,000.00	6	28,064,000.00	(10,504,000.00)	111,623,317.00
5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Laporan	2	204,307,600.00	2	174,912,000.00	(29,395,600.00)	368,585,179.00

KODE ANGGARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN,PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)		APBD		APBD-P		PERUBAHAN ANGGARAN	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025
				TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN		
5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Dokumen	2	134,280,000.00	2	98,494,000.00	(35,786,000.00)	155,035,279.00
5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	108	972,461,600.00	108	1,840,272,200.00	867,810,600.00	1,191,946,916.00
5.02.02.2.03.0012	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	Dokumen	44	197,985,400.00	44	114,466,000.00	(83,519,400.00)	31,352,371.00
5.02.03	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**Persentase Barang Milik Daerah yang digunausahakan Rata rata dari Persentase pengajuan sertfikasi Aset dan Persentase capaian pencatatan data aset**	**Persen**	**97**	**13,677,063,815.00**	**85**	**13,264,022,445.00**	**(413,041,370.00)**	**14,874,373,717.00**
5.02.03.2.01	**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**Tersedianya Dokumen Penyelenggaraan Pengelolaan Aset Daerah**	**Dokumen**	**263**	**11,000,315,940.00**	**263**	**13,264,022,445.00**	**2,263,706,505.00**	**14,874,373,717.00**
5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	Dokumen	4	642,444,400.00	4	534,168,800.00	(108,275,600.00)	738,140,975.00

KODE ANGGARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN,PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)		APBD		APBD-P		PERUBAHAN ANGGARAN	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025
				TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN		
5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen	1	132,003,000.00	1	98,824,000.00	(33,179,000.00)	336,642,853.00
5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Laporan	1	809,324,000.00	1	1,011,680,000.00	202,356,000.00	1,448,722,715.00
5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah		250	7,884,770,200.00	250	7,788,082,030.00	(96,688,170.00)	8,565,241,070.00
5.02.03.2.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Laporan	1	338,240,000.00	1	560,278,960.00	222,038,960.00	547,510,359.00
5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Dokumen	9	788,272,340.00	9	717,321,380.00	(70,950,960.00)	1,036,548,740.00
5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Laporan	1	405,262,000.00	1	297,932,000.00	(107,330,000.00)	551,567,005.00
5.02.03	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**Persentase Barang Milik Daerah yang digunausahakan**	**Persen**	**85**	**2,676,747,875.00**	**85**	**2,255,735,275.00**	(421,012,600.00)	**14,874,373,717.00**
5.02.03.2.01	**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah yang digunausahakan**	**Uni**	**17**	**2,676,747,875.00**	**17**	**2,255,735,275.00**	**(421,012,600.00)**	**14,874,373,717.00**
5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Laporan	3	433,220,000.00	3	268,318,400.00	(164,901,600.00)	577,500,000.00

KODE ANGGARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN,PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)		APBD		APBD-P		PERUBAHAN ANGGARAN	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025
				TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN		
5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Laporan	2	249,892,400.00	2	106,850,400.00	(143,042,000.00)	495,000,000.00
5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Dokumen	2	1,993,635,475.00	2	1,880,566,475.00	(113,069,000.00)	577,500,000.00

BAB IV
P E N U T U P

Rencana Kerja (Renja) Perubahan BPKAD Kabupaten Tangerang Tahun 2025 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Kabupaten Tangerang serta target dan Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Tangerang Tahun 2025.

Dokumen perubahan ini disusun dengan memperhatikan keselarasan dengan seluruh Program dan Kegiatan dalam Dokumen Renstra BPKAD Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026. Hal ini dilakukan agar seluruh isu dan permasalahan Kota secara umum dapat diselesaikan dan seluruh target serta sasaran dapat tercapai dengan baik

Dengan adanya Rencana Kerja Perubahan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2025, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tangerang diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Tangerang maupun dengan OPD yang membidangi fungsi lain.

6. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, pada Pasal 360 Ayat (1) disebutkan bahwa Perangkat Daerah menyusun Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja OPD).

Berdasarkan Pasal 343 (ayat 1) Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keaadaan meliputi :

a) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pebangunan daerah kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan dan/ atau
b) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan pada tahun berjalan.

Perubahan Renja didasarkan pada hasil evaluasi Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tangerang sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 keadaan bulan Mei. Perubahan Renja Tahun 2025 disusun sebagai bahan acuan penyusunan RKA Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2025 dengan memperhatikan dimensi waktu serta permasalahan-permasalahan yang berkembang pada masa yang akan datang sehingga dapat memberikan dampak yang optimal

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tangerang Tahun 2025, adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara ;
3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan perubahannya dan perubahannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas keputuasan Meteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutkhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 12);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 2 tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang;
9. Peraturan Bupati Tangerang nomor 31 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
10. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 39 tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah tahun 2024-2026 ;
11. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tangerang Nomor 050/Kep. 28-BKPSDM/2023 tentang Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 2024-2026;
12. Surat edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang Nomor B/100.3.4/ 2808 /III/ BAPPEDA/ 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2025 ini adalah sebagai sinkronisasi antara Renja yang telah disusun sebelumnya dan DPA Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2025 yang telah disahkan dengan Peraturan Daerah dengan kondisi/keadaan yang ada berdasarkan hasil evaluasi sampai dengan triwulan II untuk diselaraskan baik target maupun anggaran agar tercapainya tujuan dan sasaran organisasi yang berdampak pada baiknya pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan.

Tujuan penyusunan perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2025 adalah untuk Memberikan arah dan kebijakan tentang pelaksanaan program dan

kegiatan yang telah berjalan selama 2 triwulan guna penyempurnaan hasil monitoring dan evaluasi agar terjaganya konsistensi antara pencapaian Renstra BKPSDM dengan tujuan perencanaan dan penganggaran program/kegiatan BKPSDM Kabupaten Tangerang.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika Penyusunan Renja perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tangerang Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1. Latar belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025
- 2.1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja sampai Triwulan II TA. 2025
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
- 4.1. Catatan Penting dalam Penyusunan Renja

BAB V PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BKPSDM Sampai dengan triwulan II Tahun 2025

Evaluasi kinerja program dan kegiatan terhadap pelaksanaan realisasi kinerja dan realisasi anggaran yang dilakukan per triwulan sangat penting dilaksanakan sebagai upaya dalam memaksimalkan pencapaian target dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan didalam Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tangerang Tahun 2025. Memperhatikan tahapan dan tata waktu dalam rangka penyusunan Perubahan Renja BKPSDM Tahun 2025, maka kegiatan evaluasi pelaksanaan Renja BKPSDM Tahun 2025 menggunakan laporan realisasi pelaksanaan sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 kondisi sampai dengan akhir Mei 2025. Hasil evaluasi tersebut merupakan data sekaligus informasi terkait permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan program pembangunan yang telah direncanakan dalam Renja dan teranggarkan pada APBD Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2025 serta menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Hasil evaluasi Renja tahun 2024 dan Renja 2025 s/d Triwulan II dijadikan dasar penyusunan Renja Perubahan tahun 2025, dengan memperhatikan realisasi anggaran dan realiasasi target capaian kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tangerang. Evaluasi Renja tahun 2025 dilaksanakan untuk mengukur capaian kinerja BKPSDM dalam melaksanakan anggaran tahun 2025. Evaluasi mencakup realisasi target capaian kinerja, keluaran program dan kegiatan tahun 2025 terhadap RPD Kabupaten Tangerang, yang bersumber dari hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan realisasi capaian indikator sasaran Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tangerang. Berikut disajikan tabel hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah tahun 2025 sampai dengan triwulan II Bulan Mei.

Tabel 2.1.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah s/d Triwulan II
Tahun 2025 Kabupaten Tangerang
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia (BKPSDM)

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun berjalan (2025)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Triwulan II tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7
5	**Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan**					
5.03	**Kepegawaian**					
5.03.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan**	**Persen**	100	50	50,00
5.03.01.2.01	**Kegiatan:** **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Ketersediaan Dokumen perencanaan dan Pelaporan**	**Persen**	100	56	56,00
5.03.01.2.01.0001	Sub Kegiatan: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	7	2	28,57
5.03.01.2.01.0006	Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	1	100,00
5.03.01.2.01.0007	Sub Kegiatan: Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	1	100,00
5.03.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persen**	100	50	50,00
5.03..01.2.02.0001	Sub Kegiatan: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	100	99	99,00
5.03..01.2.02.0005	Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1	100,00
5.03.01.2.05	**Kegiatan:** **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase aparatur yang meningkat kapasitasnya**	**Persen**	100	-	-
5.03.01.2.05.0009	Sub Kegiatan: Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	100	-	-
5.03.01.2.06	**Kegiatan:** **Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persen**	100	35	35,00
5.03.01.2.06.0001	Sub Kegiatan: Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun berjalan (2025)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Triwulan II tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7
5.03.01.2.06.0002	Sub Kegiatan: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	8	7	87,50
5.03.01.2.06.0004	Sub Kegiatan: Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	4	100,00
5.03.01.2.06.0005	Sub Kegiatan: Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	2	100,00
5.03.01.2.06.0006	Sub Kegiatan: Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	3	3	100,00
5.03.01.2.06.0008	Sub Kegiatan: Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	6	50,00
5.03.01.2.06.0009	Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	350	80	22,86
5.03.01.2.08	**Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemenuhan Jasa Penunjang**	**Persen**	100	-	-
5.03.01.2.08.0002	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	-	-
5.03.01.2.08.0004	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	-	-
5.03.01.2.09	**Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	**Persen**	100	73	73,00
5.03.01.2.09.0001	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	6	6	100,00
5.03.01.2.09.0002	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	9	4	44,44
5.03.01.2.09.0006	Sub Kegiatan: Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	267	194	72,66
5.03.01.2.09.0009	Sub Kegiatan: Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	2	100,00
5.03.02	**Program Kepegawaian Daerah**					
		Nilai Aspek Perencanaan Kebutuhan ASN	**Nilai**	**37,5**	**-**	**-**

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun berjalan (2025)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Triwulan II tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7
		Nilai Aspek Pengadaan ASN	**Nilai**	**40**	**-**	**-**
		Nilai Aspek Pengembangan Karier	**Nilai**	**75**	**-**	**-**
		Nilai Aspek Promosi dan Mutasi	**Nilai**	**40**	**-**	**-**
		Nilai Aspek Manajemen Kinerja	**Nilai**	**80**	**-**	**-**
		Nilai Aspek Penggajian, Penghargaan dan Disiplin	**Nilai**	**40**	**-**	**-**
		Nilai Aspek perlindungan dan pelayanan	**Nilai**	**16**	**-**	**-**
		Nilai Aspek Sistem Informasi Kepegawaian	**Nilai**	**24**	**-**	**-**
5.03.02.2.01	**Kegiatan:** **Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	**Persentase pemenuhan pengadaan ASN, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN**	**Persen**	100	-	-
5.03.02.2.01.0002	Sub Kegiatan: Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Dokumen	1	-	-
5.03.02.2.01.0003	Sub Kegiatan: Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Dokumen	1	-	-
5.03.02.2.01.0006	Sub Kegiatan: Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Dokumen	1	-	-
5.03.02.2.01.0010	Sub Kegiatan: Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	1	-	-
5.03.02.2.01.0011	Sub Kegiatan: Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	Dokumen	1	-	-
5.03.02.2.02	**Kegiatan:** **Mutasi dan Promosi ASN**	**Persentase pemenuhan fasilitasi layanan mutasi dan promosi ASN**	**Persen**	100	-	-
5.03.02.2.02.0001	Sub Kegiatan: Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Dokumen	1	-	-
5.03.02.2.02.0002	Sub Kegiatan: Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Dokumen	2	-	-
5.03.02.2.02.0003	Sub Kegiatan: Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Dokumen	1	-	-
5.03.02.2.03	**Kegiatan:** **Pengembangan Kompetensi ASN**	**Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi ASN**	**Persen**	100	-	-

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun berjalan (2025)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Triwulan II tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7
5.03.02.2.03.0001	Sub Kegiatan: Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya	Orang	500	247	49,40
5.03.02.2.03.0002	Sub Kegiatan: Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	Dokumen	1	-	-
5.03.02.2.03.0004	Sub Kegiatan: Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	Orang	700	350	50,00
5.03.02.2.03.0007	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah laporan hasil evaluasi diklat dan sertifikasi jabatan ASN	Laporan	2	-	-
5.03.02.2.04	**Kegiatan:** **Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	**Persentase pemenuhan penilaian dan evaluasi kinerja Aparatur**	**Persen**	100	10	10,00
5.03.02.2.04.0002	Sub Kegiatan: Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Dokumen	1	-	-
5.03.02.2.04.0003	Sub Kegiatan: Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Laporan	1	-	-
5.03.02.2.04.0004	Sub Kegiatan: Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang diberikan penghargaan	Orang	12	-	-
5.03.02.2.04.0007	Sub Kegiatan: Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan pembinaan kedisiplinan	Orang	14480	14480	100,00
5.03.02.2.04.0009	Sub Kegiatan: Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	Dokumen	1	-	-
5.04	**Pendidikan dan Pelatihan**					
5.04.02	**Program Pengembangan SDM**	**Nilai Aspek Pengembangan Karier**	**Nilai**	**75**	**-**	**-**
5.04.02.2.01	**Kegiatan:** **Pengembangan Kompetensi Teknis**	**Persentase aparatur yang mendapatkan pengembangan kompetensi Teknis sesuai analisis kesenjangan kinerja dan kompetensi**	**Persen**	100	22	22,00
5.04.02.2.01.0003	Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	Orang	14000	3043	21,74
5.04.02.2.02	**Kegiatan:** **Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**	**Persentase aparatur yang mendapatkan pengembangan kompetensi manajerial, fungsional dan latsar/prajabatan**	**Persen**	100	**-**	-
5.04.02.2.02.0007	Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Laporan	1	-	-

Adapun realisasai pelaksanaan Program dan Kegiatan sampai dengan triwulan II sampai dengan tanggal 23 Juni 2025 Penyerapan anggaran telah mencapai 47,85 % atau sebanyak Rp14.606.423.673,- dari total pagu anggaran Rp. 35.610.077.850,-. Berdasarkan evaluasi kegiatan sampai dengan triwulan II bahwa pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai jadwal yang direncanakan dengan penyerapan sesuai kas budget, selisih target penyerapan anggaran dari selisih penawaran belanja modal dan silpa dari belanja pegawai (Gaji dan Tunjangan) serta terdapat beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan sesuai rencana akan dialihkan pada proses perubahan anggaran seperti kegiatan pelaksanaan pelantikan promosi mutasi serta rapat-rapat mutasi karena alasan tertentu, juga kegiatan penilaian merit sistem karena seharusnya tahun 2025 Kabupaten Tangerang kembali dievaluasi implementasi merit sistem setelah dua tahun sejak mendapatkan nilai sangat baik, akan tetapi tahun 2025 merupakan masa transisi peralihan fungsi pemantauan dan pengendalian penerapan manajemen ASN berbasis meritokrasi dari semula oleh KASN berdasarkan UU nomor 20 tahun 2023 beralih ke BKN. Dari hasil koordinasi bahwa tahun 2025 dimungkinkan belum dapat dilakukan evaluasi karena pola evaluasi masih dirumuskan. Oleh karena itu terdapat anggaran pendampingan dan penilaian merit sistem akan dialihkan untuk kegiatan yang masih membutuhkan anggaran tambahan khususnya dalam rangka penguatan manajemen talenta dalam pola karier ASN di Kabupaten Tangerang.

Capaian fisik kegiatan sampai dengan triwulan II khususnya sampai dengan tanggal 23 Juni 2025 telah mencapai 50 % dari target kinerja yang direncanakan di setiap Program, kegiatan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Terdapat beberapa hal yang menjadi perhatian pelaksanaan program dan kegiatan untuk memenuhi target Renstra yaitu:

1. Pelaksanaan program dan kegiatan agar dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan dan fokus pada pencapaian target tujuan dan sasaran kinerja BKPSDM tahun 2025
2. Untuk anggaran kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dan akan menjadi silpa, anggaran akan dialihkan untuk program kegiatan yang dapat mendukung tercapainya tujuan dan sasaran BKPSDM TA 2025
3. Memaksimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam mendukung pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Bagian ini berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan BKPSDM Kabupaten Tangerang berdasarkan Indikator Kinerja yang sudah ditentukan dalam Renstra maupun terhadap IKU (Indikator Kinerja Utama) dan Perjanjian Kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan Renstra tahun 2024-2026 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tangerang telah menetapkan tujuan dan sasaran berserta target capaiannya, dimana tahun 2025 ini merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Strategis tersebut. Berikut merupakan tujuan dan sasaran Badan kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia berdasarkan Rencana Strategis tahun 2024-2026:

Tabel 2.2.1
Tujuan dan Sasaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tangerang berdasaran Rencana Strategis 2024-2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
MISI 4	**Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik melalui Digitalisasi dan Integrasi Pelayanan Publik**		
	Meningkatkan Kualitas ASN	Meningkatnya Implementasi manajemen ASN berbasis sistem merit	Indeks Sistem Merit
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BKPSDM Kabupaten Tangerang	Nilai AKIP BKPSDM Kabupaten Tangerang

Capaian Indikator sasaran nilai indeks sistem merit merupakan gambaran capaian kinerja pelayanan kepegawaian yang ada pada Kabupaten Tangerang dimana aspek-aspek pada penilaian sistem merit merupakan pelaksanaan manajemen kepegawaian dari mulai Perencanaan pegawai, Proses pengadaan pegawai, Proses rotasi dan mutasi, Pengembangan karir pegawai, Manajemen kinerja, Aspek penggajian, Penghargaan dan disiplin, Aspek Perlindungan dan pelayanan serta Aspek pelayanan kepegawaian berbasis sistem online dan terintegrasi.

Capaian indek sistem merit Kabupaten Tangerang tahun 2023 telah mencapai kategori sangat baik dari KASN dengan nilai 350,5. Berikut disajikan capaian kinerja pelayanan BKPSDM sampai dengan triwulan II tahun 2024 :

Tabel 2.2.2
Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tangerang Sampai Dengan TW II tahun 2025

No.	Indikator Kinerja tujuan dan Sasaran	Satuan	Target Kinerja Capaian Renstra	Realisasi/ Proyeksi Kinerja Capaian Renstra tahun berjalan	Catatan Analisis
1	2	3	4	5	6
I	Indeks Profesionalitas ASN	Nilai	71	80,82	Nilai IP ASN yang dapat disajikan untuk Kabupaten Tangerang berdasarkan data sampai dengan bulan Mei 2025.
	1. Indeks Sistem Merit	Nilai	352,5	350,50	Capaian atas penerapan merit sistem tahun 2023
	2. Nilai AKIP BKPSDM Kabupaten Tangerang	Nilai	82,30	88,1	Nilai Akuntabilitas kinerja BKPSDM tahun 2024 dan untuk capaian tahun 2025 berdasarkan hasil evaluasi atas laporan AKIP BKPSDM tahun 2025 pada akhir tahun 2025

Berdasarkan hasil evaluasi KASN atas implementasi Manajemen ASN berbasis Sistem Merit Kabupaten Tangerang tahun 2023 serta hasil Reviu Inspektorat atas Laporan Akuntabilitas Kinerja BKPSDM tahun 2024, Maka BKPSDM perlu merubah penetapan target capaian indikator Kinerja Utama sebagai target Perjanjian Kinerja Kepala BKPSDM dengan mengacu pada hasil evaluasi KASN dan hasil reviu Inspektorat atas capaian nilai tahun 2024. Berikut disajikan perubahan target capaian IKU BKPSDM :

Tabel 2.2.3
Perubahan Target Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tangerang tahun 2025

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA RENSTRA	PERUBAHAN TARGET KINERJA 2025
MISI 4	**Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik melalui Digitalisasi dan Integrasi Pelayanan Publik**				
	Meningkatkan Kualitas ASN		Indeks Profesionalitas ASN		82,4
		Meningkatnya Implementasi manajemen ASN berbasis sistem merit	Indeks Sistem Merit	338,5	350,50
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BKPSDM Kabupaten Tangerang	Nilai AKIP BKPSDM Kabupaten Tangerang	82	88,2

2.3 Isu-Isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Isu strategis yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam hal ini BKPSDM Kabupaten Tangerang tahun 2025 adalah Peningkatan Peningkatan Kapasitas ASN melalui pemagangan dan sertifikasi ASN. Juga peningkatan implemetasi system merit dalam pengelolaan manajemen ASN di Kabupaten Tangerang.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, BKPSDM Kabupaten Tangerang diantaranya menghadapi beberapa permasalahan, :

1. Belum Optimalnya penataan tenaga Non ASN
2. Belum optimalnya pelayanan administasi kepegawaian
3. Belum Optimalnya fungsi manajemen kinerja
4. Belum optimalnya pembinaan disiplin dan kode etik ASN
5. Belum optimalnya upaya pengembangan kompetensi ASN Kabupaten Tangerang
6. Belum Optimalnya pengelolaan penilaian kompetensi ASN

Adapun arah kebijakan yang dilakukan adalah :

1. Koordinasi dengan instansi yang membidangi penyusunan anjab/ABK sebagai dasar perencanaan kebutuhan pegawai di Kabupaten Tangerang
2. Penyelesaian tenaga non ASN pada pengadaan PPPK tahap 2
3. Peningkatan kinerja aparatur melalui penerapan manajemen kinerja
4. Peningkatan disiplin aparatur melalui pembinaan, pemberian penghargaan dan penegakan disiplin aparatur
5. Peningkatan pengembangan karier aparatur melalui optimalisasi penilaian kompetensi sebagai sarana untuk memintakan profil pegawai dalam manajemen talenta
6. Peningkatan pelayanan kepegawaian sesuai Standar Pelayanan
7. Peningkatan pelayanan kepegawaian melalui pemutakhiran sistem informasi kepegawaian yang sinkron dan terintegrasi

2.4 Reviu terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD

Renja BKPSDM bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan apabila ditunjang dengan produk dokumen perencanaan yang baik. hal ini dalam rangka mengawal program dan kegiatan yang dilaksanakan agar berjalan efektif, efesien dan tepat sasaran. pada masa transisi atau masa kekosongan Kepala Daerah diantaranya : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD 2005-2025), Rencana Pembangunan Daerah (RPD 2024-2026), Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Hasil review terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD dan hasil analisa kebutuhan untuk pelaksanaan Program dan Kegiatan pada anggaran perubahan tahun 2025, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tangerang untuk anggaran perubahan 2025 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp37.138.187.964,- dari kebutuhan sesuai analisis sebesar Rp36.009.814.750,-. Pada tahun 2025 sesuai rancangan awal, BKPSDM Kabupaten Tangerang akan melaksanakan 3 Program, 12 Kegiatan, 38 Sub Kegiatan.

Tabel 2.4.1
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025
KABUPATEN TANGERANG

KODE	RANCANGAN AWAL PERUBAHAN RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				**37.138.187.964**	**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**				**36.009.814.750**	
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**				**37.138.187.964**	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**				**36.009.814.750**	
5.03	**KEPEGAWAIAN**				**30.486.496.280**	**KEPEGAWAIAN**				**30.084.142.250**	
5.03.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan**	**100 Persen**	**24.800.892.610**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan**	**100 Persen**	**25.069.013.810**	
5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		*Persentase Ketersediaan Dokumen perencanaan dan Pelaporan*	100 Persen	190.348.200	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		*Persentase Ketersediaan Dokumen perencanaan dan Pelaporan*	100 Persen	157.969.000	
5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					
		Kab. Tangerang	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	5 Dokumen	157.024.000		Kab. Tangerang	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	7 Dokumen	125.937.000	
5.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					
		Kab. Tangerang	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	1 Laporan	11.662.000		Kab. Tangerang	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	1 Laporan	11.662.000	
5.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					

KODE	RANCANGAN AWAL PERUBAHAN RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Kab. Tangerang	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	1 Laporan	21.662.200		Kab. Tangerang	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	1 Laporan	20.370.000	
5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		*Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	100 Persen	20.222.298.542	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		*Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	100 Persen	20.366.035.442	
5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					
		Kab. Tangerang	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	100 Orang/ bulan	20.150.066.802		Kab. Tangerang	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	100 Orang/ bulan	20.293.803.702	
5.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					
		Kab. Tangerang	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	1 Laporan	72.231.740		Kab. Tangerang	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	1 Laporan	72.231.740	
5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		*Prosentase aparatur yang meningkat kapasitasnya*	100 Persen	239.610.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		*Prosentase aparatur yang meningkat kapasitasnya*	100 Persen	190.660.000	
5.03.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					
		Kab. Tangerang	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*	100 Orang	239.610.000		Kab. Tangerang	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*	100 Orang	190.660.000	
5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		*Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	100 Persen	1.832.775.600	Administrasi Umum Perangkat Daerah		*Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	100 Persen	2.039.365.202	
5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					
		Kab. Tangerang	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	1 Paket	19.520.000		Kab. Tangerang	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	1 Paket	19.520.000	
5.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					

KODE	RANCANGAN AWAL PERUBAHAN RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Kab. Tangerang	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	20 Paket	1.002.270.300		Kab. Tangerang	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	8 Paket	1.472.171.702	
5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					Penyediaan Bahan Logistik Kantor					
		Kab. Tangerang	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	5 Paket	188.198.300		Kab. Tangerang	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	4 Paket	188.198.300	
5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					
		Kab. Tangerang	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	2 Paket	143.324.000		Kab. Tangerang	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	2 Paket	107.098.200	
5.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					
		Kab. Tangerang	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*	4 Dokumen	5.760.000		Kab. Tangerang	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*	3 Dokumen	5.760.000	
5.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu					Fasilitasi Kunjungan Tamu					
		Kab. Tangerang	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	40 Laporan	91.615.000		Kab. Tangerang	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	12 Laporan	75.263.000	
5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					
		Kab. Tangerang	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	350 Laporan	382.088.000		Kab. Tangerang	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	175 Laporan	171.354.000	
5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		*Persentase pemenuhan Jasa Penunjang*	100 Persen	1.141.522.352	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		*Persentase pemenuhan Jasa Penunjang*	100 Persen	1.055.817.500	
5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					
		Kab. Tangerang	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	1 Laporan	26.400.000		Kab. Tangerang	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	1 Laporan	26.400.000	

KODE	RANCANGAN AWAL PERUBAHAN RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					
		Kab. Tangerang	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	1 Laporan	1.115.122.352		Kab. Tangerang	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	1 Laporan	1.029.417.500	
5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		*Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah*	100 Persen	1.174.337.916	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		*Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah*	100 Persen	1.259.166.666	
5.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					
		Kab. Tangerang	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*	6 Unit	219.159.956		Kab. Tangerang	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*	6 Unit	214.517.706	
5.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					
		Kab. Tangerang	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	11 Unit	197.777.960		Kab. Tangerang	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	9 Unit	188.998.960	
5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					
		Kab. Tangerang	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	271 Unit	364.400.000		Kab. Tangerang	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	267 Unit	364.400.000	
5.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					
		Kab. Tangerang	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	2 Unit	393.000.000		Kab. Tangerang	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	2 Unit	491.250.000	
5.03.02	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**				**5.685.603.670**	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**				**5.015.128.440**	
			Nilai Aspek Perencanaan Kebutuhan ASN	Nilai 40				**Nilai Aspek Perencanaan Kebutuhan ASN**	Nilai 37,5		
			Nilai Aspek Pengadaan ASN	Nilai 40				**Nilai Aspek Pengadaan ASN**	Nilai 40		

KODE	RANCANGAN AWAL PERUBAHAN RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Nilai Aspek Pengembangan Karier	Nilai 72,5				**Nilai Aspek Pengembangan Karier**	Nilai 75		
			Nilai Aspek Promosi dan Mutasi	Nilai 40				**Nilai Aspek Promosi dan Mutasi**	Nilai 40		
			Nilai Aspek Manajemen Kinerja	Nilai 80				**Nilai Aspek Manajemen Kinerja**	Nilai 80		
			Nilai Aspek Penggajian, Penghargaan dan Disiplin	Nilai 40				**Nilai Aspek Penggajian, Penghargaan dan Disiplin**	Nilai 40		
			Nilai Aspek perlindungan dan pelayanan	Nilai 16				**Nilai Aspek perlindungan dan pelayanan**	Nilai 16		
			Nilai Aspek Sistem Informasi Kepegawaian	Nilai 24				**Nilai Aspek Sistem Informasi Kepegawaian**	Nilai 24		
5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		*Persentase pemenuhan pengadaan ASN, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN*	100 Persen	1.352.724.600	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		*Persentase pemenuhan pengadaan ASN, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN*	100 Persen	942.836.400	
5.03.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN					Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN					
		Kab. Tangerang	*Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN*	1 Dokumen	48.580.000		Kab. Tangerang	*Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN*	1 Dokumen	37.700.000	
5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK					Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK					
		Kab. Tangerang	*Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK*	1 Dokumen	817.830.000		Kab. Tangerang	*Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK*	1 Dokumen	418.670.000	
5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian					Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian					
		Kab. Tangerang	*Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian*	1 Dokumen	132.570.400		Kab. Tangerang	*Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian*	1 Dokumen	101.484.800	
5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian					Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian					

KODE	RANCANGAN AWAL PERUBAHAN RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Kab. Tangerang	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian*	1 Dokumen	218.081.000		Kab. Tangerang	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian*	1 Dokumen	200.749.000	
5.03.02.2.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian					Pengelolaan Data Kepegawaian					
		Kab. Tangerang	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian*	1 Dokumen	135.663.200		Kab. Tangerang	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian*	1 Dokumen	184.232.600	
5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN		*Persentase pemenuhan fasilitasi layanan mutasi dan promosi ASN*	100 Persen	433.814.800	Mutasi dan Promosi ASN		*Persentase pemenuhan fasilitasi layanan mutasi dan promosi ASN*	100 Persen	374.136.800	
5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN					Pengelolaan Mutasi ASN					
		Kab. Tangerang	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah*	1 Dokumen	87.176.000		Kab. Tangerang	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah*	1 Dokumen	74.170.000	
5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN					Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN					
		Kab. Tangerang	*Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN*	2 Dokumen	225.840.000		Kab. Tangerang	*Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN*	2 Dokumen	187.536.000	
5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN					Pengelolaan Promosi ASN					
		Kab. Tangerang	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN*	1 Dokumen	120.798.800		Kab. Tangerang	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN*	1 Dokumen	112.430.800	
5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN		*Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi ASN*	100 Persen	3.015.166.670	Pengembangan Kompetensi ASN		*Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi ASN*	100 Persen	2.961.620.640	
5.03.02.2.03.0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN					Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN					
		Kab. Tangerang	*Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya*	155 Orang	784.237.400		Kab. Tangerang	*Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya*	500 Orang	737.581.400	
5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN					Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN					
		Kab. Tangerang	*Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan*	3 Orang	235.363.000		Kab. Tangerang	*Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan*	700 Orang	233.107.000	

KODE	RANCANGAN AWAL PERUBAHAN RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.03.02.2.03.0007	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN					Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN					
		Kab. Tangerang	*Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN*	2 Laporan	466.621.000		Kab. Tangerang	*Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN*	2 Laporan	564.409.500	
5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		*Persentase pemenuhan penilaian dan evaluasi kinerja Aparatur*	100 Persen	883.897.600	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		*Persentase pemenuhan penilaian dan evaluasi kinerja Aparatur*	100 Persen	736.534.600	
5.03.02.2.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur					Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur					
		Kab. Tangerang	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur*	1 Dokumen	132.618.800		Kab. Tangerang	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur*	1 Dokumen	158.669.800	
5.03.02.2.04.0003	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur					Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur					
		Kab. Tangerang	*Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur*	1 Laporan	178.192.800		Kab. Tangerang	*Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur*	1 Laporan	133.644.600	
5.03.02.2.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai					Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai					
		Kab. Tangerang	*Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan*	12 Orang	267.908.000		Kab. Tangerang	*Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan*	12 Orang	163.059.200	
5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN					Pembinaan Disiplin ASN					
		Kab. Tangerang	*Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan*	14480 Orang	138.996.000		Kab. Tangerang	*Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan*	14480 Orang	117.643.000	
5.03.02.2.04.0009	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai					Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai					
		Kab. Tangerang	*Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani*	1 Dokumen	166.182.000		Kab. Tangerang	*Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani*	1 Dokumen	163.518.000	
5.04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**				**6.651.691.684**	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**				**5.925.672.500**	
5.04.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**		**Nilai Aspek Pengembangan Karier**	**72,5 Nilai**	**6.651.691.684**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**		**Nilai Aspek Pengembangan Karier**	**75 Nilai**	**5.925.672.500**	

KODE	RANCANGAN AWAL PERUBAHAN RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis		*Persentase aparatur yang mendapatkan pengembangan kompetensi Teknis sesuai analisis kesenjangan kinerja dan kompetensi*	100 Persen	2.432.258.684	Pengembangan Kompetensi Teknis		*Persentase aparatur yang mendapatkan pengembangan kompetensi Teknis sesuai analisis kesenjangan kinerja dan kompetensi*	100 Persen	2.228.710.500	
5.04.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum					Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum					
		Kab. Tangerang	*Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi*	14000 Orang	2.432.258.684		Kab. Tangerang	*Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi*	14000 Orang	2.228.710.500	
5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		*Persentase aparatur yang mendapatkan pengembangan kompetensi manajerial, fungsional dan latsar/prajabatan*	100 Persen	4.219.433.000	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		*Persentase aparatur yang mendapatkan pengembangan kompetensi manajerial, fungsional dan latsar/prajabatan*	100 Persen	3.696.962.000	
5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan					Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan					
		Kab. Tangerang	*Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan*	1 Laporan	4.219.433.000		Kab. Tangerang	*Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan*	1 Laporan	3.696.962.000	
	UPTD PENILAIAN KOMPETENSI				**37.138.187.964**	**UPTD PENILAIAN KOMPETENSI**				**36.009.814.750**	
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**				**37.138.187.964**	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**				**36.009.814.750**	
5.03	**KEPEGAWAIAN**				**30.486.496.280**	**KEPEGAWAIAN**				**30.084.142.250**	
5.03.02	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**		**Nilai Aspek Pengembangan Karier**	**72,5 Nilai**	**5.685.603.670**	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**		**Nilai Aspek Pengembangan Karier**	**75 Nilai**	**5.015.128.440**	
5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN		*Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi ASN*	100 Persen	3.015.166.670	Pengembangan Kompetensi ASN		*Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi ASN*	100 Persen	2.961.620.640	

KODE	RANCANGAN AWAL PERUBAHAN RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.03.02.2.03.0002	Pengelolaan Assessment Center					Pengelolaan Assessment Center					
		Kab. Tangerang	*Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center*	1 Dokumen	1.528.945.270		Kab. Tangerang	*Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center*	1 Dokumen	1.426.522.740	
J U M L A H					**37.138.187.964**					**36.009.814.750**	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Renja Perubahan BKPSDM Kabupaten Tangerang Tahun 2025 merupakan hasil evaluasi atas kinerja program, anggaran dan kegiatan pada rencana kerja murni tahun 2025 yang merupakan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan dalam dokumen Renstra BKPSDM Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026. Renja Peubahan BKPSDM Kabupaten Tangerang Tahun 2025 mengacu pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD sebagai pengganti Permendagri nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah..

Dalam konteks peningkatan SDM Aparatur, BKPSDM Kabupaten Tangerang dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan, melayani dan memenuhi kebutuhan pegawai. Disisi lain, dalam era globalisasi, transformasi dan teknologi informasi, BKPSDM dituntut untuk siap dan sanggup membuat/menyusun suatu perencanaan yang baik untuk meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan pegawai.

Seperti hal nya pada Rencana Kerja murni tahun 2025 dari hasil forum Perangkat Daerah dan Aplikasi SIPD tahun 2024, tidak ada usulan dari Perangkat Daerah ke BKPSDM, maka para Rencana Kerja Perubahan tahun 2025 juga BKPSDM tidak memiliki usulan Kegiatan dari Masyarakat.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN TANGERANG

3.1. Program dan Kegiatan Dalam Perubahan Rencana Kerja BKPSDM Tahun 2025

Mempertimbangkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sampai dengan Triwulan II tahun anggaran 2025 pasca dilakukan efisiensi anggaran untuk 5 kode rekening sebesar Rp35.610.077.850,-. Terdapat beberapa rencana kerja awal yang perlu penyesuaian kembali, oleh karena itu perlu di susun perubahan-perubahan rencana kerja kegiatan agar pelaksanaan program dan kegiatan lebih efektif dalam hal mencapai tujuan dan sasaran BKPSDM serta efisien dalam hal penyerapan anggaran.

Berdasarkan hal tersebut terdapat prediksi silpa yang cukup besar pada rencana kerja murni BKPSDM tahun anggaran 2025. Untuk meminimalisir terjadinya silpa, maka pada renja perubahan ini BKPSDM melakukan pengalihan anggaran yang menjadi prediksi silpa tersebut untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang memerlukan dana seperti : Penambahan anggaran sebesar Rp250.000.000,- diperuntukan untuk penyediaan sarana prasarana podcast, karena dengan adanya Podcast sangat support untuk pengembangan kompetensi dan BKPSDM sudah mempunyai ruang khusus untuk kegiatan podcast di gedung kitri bakti disamping itu juga anggran tersebut diperuntukkan untuk penanbahan anggaran Pelatihan Teknis.

1. Penambahan anggaran sebesar Rp. 143.736.900 untuk penyesuaian gaji Pegawai.
2. THR dan gaji 13 Non PNS sebesar Rp. 6.000.000 digunakan untuk membiayai 4 orang tenaga Non ASN yang belum teranggarkan.
3. Dalam APBD Perubahan tahun 2025 Rincian program dan Kegiatan Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tangerang dengan jumlah kebutuhan anggaran Rp 36.009.814.750,- dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.1.1

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2025 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN TANGERANG

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025		PAGU TAHUN 2025 (Rp)		Bertambah/ Berkurang (6-7)
			SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	
1	2	3	4	5	6	7	8
	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				**37.138.187.964**	**36.009.814.750**	**1.128.373.214**
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**				**37.138.187.964**	**36.009.814.750**	**1.128.373.214**
5.03	**KEPEGAWAIAN**				**30.486.496.280**	**30.084.142.250**	**402.354.030**
5.03.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan**	**100 Persen**	**100 Persen**	**24.800.892.610**	**25.069.013.810**	**-268.121.200**
5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Ketersediaan Dokumen perencanaan dan Pelaporan*	100 Persen	100 Persen	190.348.200	157.969.000	32.379.200
5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	7 Dokumen	157.024.000	125.937.000	31.087.000
5.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	11.662.000	11.662.000	0
5.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025		PAGU TAHUN 2025 (Rp)		Bertambah/ Berkurang (6-7)
			SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	21.662.200	20.370.000	1.292.200
5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	100 Persen	100 Persen	20.222.298.542	20.366.035.442	-143.736.900
5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 Orang/ bulan	100 Orang/ bulan	20.150.066.802	20.293.803.702	-143.736.900
5.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	72.231.740	72.231.740	0
5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Prosentase aparatur yang meningkat kapasitasnya*	100 Persen	100 Persen	239.610.000	190.660.000	48.950.000
5.03.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100 Orang	100 Orang	239.610.000	190.660.000	48.950.000
5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	100 Persen	100 Persen	1.832.775.600	2.039.365.202	-206.589.602

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025		PAGU TAHUN 2025 (Rp)		Bertambah/ Berkurang (6-7)
			SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	
1	2	3	4	5	6	7	8
5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	19.520.000	19.520.000	0
5.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket	8 Paket	1.002.270.300	1.472.171.702	-469.901.402
5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	4 Paket	188.198.300	188.198.300	0
5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	143.324.000	107.098.200	36.225.800
5.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	3 Dokumen	5.760.000	5.760.000	0
5.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	40 Laporan	12 Laporan	91.615.000	75.263.000	16.352.000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025		PAGU TAHUN 2025 (Rp)		Bertambah/ Berkurang (6-7)
			SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	
1	2	3	4	5	6	7	8
5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	350 Laporan	175 Laporan	382.088.000	171.354.000	210.734.000
5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pemenuhan Jasa Penunjang*	100 Persen	100 Persen	1.141.522.352	1.055.817.500	85.704.852
5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	26.400.000	26.400.000	0
5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1.115.122.352	1.029.417.500	85.704.852
5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah*	100 Persen	100 Persen	1.174.337.916	1.259.166.666	-84.828.750
5.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	6 Unit	219.159.956	214.517.706	4.642.250
5.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025		PAGU TAHUN 2025 (Rp)		Bertambah/ Berkurang (6-7)
			SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	9 Unit	197.777.960	188.998.960	8.779.000
5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	271 Unit	267 Unit	364.400.000	364.400.000	0
5.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	393.000.000	491.250.000	-98.250.000
5.03.02	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**				**5.685.603.670**	**5.015.128.440**	**670.475.230**
		Nilai Aspek Perencanaan Kebutuhan ASN	Nilai 40	Nilai 37,5			
		Nilai Aspek Pengadaan ASN	Nilai 40	Nilai 40			
		Nilai Aspek Pengembangan Karier	Nilai 72,5	Nilai 75			
		Nilai Aspek Promosi dan Mutasi	Nilai 40	Nilai 40			
		Nilai Aspek Manajemen Kinerja	Nilai 80	Nilai 80			
		Nilai Aspek Penggajian, Penghargaan dan Disiplin	Nilai 40	Nilai 40			
		Nilai Aspek perlindungan dan pelayanan	Nilai 16	Nilai 16			
		Nilai Aspek Sistem Informasi Kepegawaian	Nilai 24	Nilai 24			
5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	*Persentase pemenuhan pengadaan ASN, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN*	100 Persen	100 Persen	1.352.724.600	942.836.400	409.888.200

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025		PAGU TAHUN 2025 (Rp)		Bertambah/ Berkurang (6-7)
			SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	
1	2	3	4	5	6	7	8
5.03.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN						
		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	48.580.000	37.700.000	10.880.000
5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK						
		Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 Dokumen	1 Dokumen	817.830.000	418.670.000	399.160.000
5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian						
		Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	1 Dokumen	1 Dokumen	132.570.400	101.484.800	31.085.600
5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian						
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	218.081.000	200.749.000	17.332.000
5.03.02.2.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian						
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	135.663.200	184.232.600	-48.569.400
5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	*Persentase pemenuhan fasilitasi layanan mutasi dan promosi ASN*	100 Persen	100 Persen	433.814.800	374.136.800	59.678.000
5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN						

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025		PAGU TAHUN 2025 (Rp)		Bertambah/ Berkurang (6-7)
			SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	87.176.000	74.170.000	13.006.000
5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN						
		Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	2 Dokumen	2 Dokumen	225.840.000	187.536.000	38.304.000
5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN						
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	120.798.800	112.430.800	8.368.000
5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	*Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi ASN*	100 Persen	100 Persen	3.015.166.670	2.961.620.640	53.546.030
5.03.02.2.03.0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN						
		Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya	155 Orang	500 Orang	784.237.400	737.581.400	46.656.000
5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN						
		Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	3 Orang	700 Orang	235.363.000	233.107.000	2.256.000
5.03.02.2.03.0007	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN						
		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	2 Laporan	2 Laporan	466.621.000	564.409.500	-97.788.500

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025		PAGU TAHUN 2025 (Rp)		Bertambah/ Berkurang (6-7)
			SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	
1	2	3	4	5	6	7	8
5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	*Persentase pemenuhan penilaian dan evaluasi kinerja Aparatur*	100 Persen	100 Persen	883.897.600	736.534.600	147.363.000
5.03.02.2.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur						
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	1 Dokumen	132.618.800	158.669.800	-26.051.000
5.03.02.2.04.0003	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur						
		Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Laporan	1 Laporan	178.192.800	133.644.600	44.548.200
5.03.02.2.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai						
		Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	12 Orang	12 Orang	267.908.000	163.059.200	104.848.800
5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN						
		Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	14480 Orang	14480 Orang	138.996.000	117.643.000	21.353.000
5.03.02.2.04.0009	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai						
		Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	1 Dokumen	1 Dokumen	166.182.000	163.518.000	2.664.000
5.04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**				**6.651.691.684**	**5.925.672.500**	**726.019.184**
5.04.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	**Nilai Aspek Pengembangan Karier**	**72,5 Nilai**	**75 Nilai**	**6.651.691.684**	**5.925.672.500**	**726.019.184**

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025		PAGU TAHUN 2025 (Rp)		Bertambah/ Berkurang (6-7)
			SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	
1	2	3	4	5	6	7	8
5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	*Persentase aparatur yang mendapatkan pengembangan kompetensi Teknis sesuai analisis kesenjangan kinerja dan kompetensi*	100 Persen	100 Persen	2.432.258.684	2.228.710.500	203.548.184
5.04.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum						
		Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	14000 Orang	14000 Orang	2.432.258.684	2.228.710.500	203.548.184
5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	*Persentase aparatur yang mendapatkan pengembangan kompetensi manajerial, fungsional dan latsar/prajabatan*	100 Persen	100 Persen	4.219.433.000	3.696.962.000	522.471.000
5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan						
		Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1 Laporan	1 Laporan	4.219.433.000	3.696.962.000	522.471.000
	UPTD PENILAIAN KOMPETENSI				**37.138.187.964**	**36.009.814.750**	**1.128.373.214**
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**				**37.138.187.964**	**36.009.814.750**	**1.128.373.214**
5.03	**KEPEGAWAIAN**				**30.486.496.280**	**30.084.142.250**	**402.354.030**
5.03.02	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**Nilai Aspek Pengembangan Karier**	**72,5 Nilai**	**75 Nilai**	**5.685.603.670**	**5.015.128.440**	**670.475.230**
5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	*Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi ASN*	100 Persen	100 Persen	3.015.166.670	2.961.620.640	53.546.030

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025		PAGU TAHUN 2025 (Rp)		Bertambah/ Berkurang (6-7)
			SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	
1	2	3	4	5	6	7	8
5.03.02.2.03.0002	Pengelolaan Assessment Center						
		Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	1 Dokumen	1 Dokumen	1.528.945.270	1.426.522.740	102.422.530
J U M L A H					**37.138.187.964**	**36.009.814.750**	**1.128.373.214**

Berdasarkan table tersebut, Nama program, Kegiatan dan Sub Kegiatan telah di sesuaikan antara identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan hasil analisis dengan arahan prioritas program dan kegiatan SKPD menurut rancangan awal RKPD, serta mempertimbangkan hasil telaahan kebijakan nasional.

BAB IV
PENUTUP

4.1. Catatan Penting dalam Penyusunan Renja

Perubahan Rencana kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tangerang tahun 2025 ini merupakan dokumen yang disusun sebagai upaya sinkronisasi dan sinergitas terhadap dinamika kondisi nasional maupun daerah selama triwulan I dan triwulan II tahun 2025. Berdasarkan pada perubahan RKPD Kabupaten Tangerang tahun 2025 maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tangerang menyusun perubahan rencana kerja tahun 2025.

Perubahan rencana kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tangerang tahun 2025 merupakan acuan penyusuan perubahan Rencana Kerja Anggaran tahun 2025 yang juga digunakan sebagai dasar penyusunan perubahan APBD tahun 2025

Dengan tersusunnya perubahan renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tangerang tahun 2025 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak dan mampu mendorong pencapaian program prioritas dan sasaran pembangunan di Kabupaten Tangerang.

4.2. Kaidah-Kaidah

Dalam pelaksanaan rencana kerja perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tangerang tahun 2025 memperhatikan kaidah-kaidah sebagai berikut :

1. Memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja triwulan II tahun 2025 sampai bulan Mei berdasarkan anggaran pasca efisiensi.
2. Masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya
3. Tujuan yang di kehendaki
4. Sasaran dan prioritas yang akan di wujudkan
5. Kebijakan-kebijakan dalam pelaksanaannya
6. Memperhatikan keberlanjutan (*sustainable development*) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan

4.3. Rencana Tindak Lanjut

Pencapaian pelaksanaan target kinerja yang direncanakan dalam realisasinya memungkinkan ada yang tidak sesuai target yang telah di tetapkan, untuk itu diperlukan evaluasi target kinerja dan anggaran untuk menentukan rencana tindak lanjut sebagai bahan perencanaan kinerja program dan kegiatan pada tahun yang akan datang.

Pada Akhirnya apa yang telah menjadi Program dan Kegiatan pada Rencana Kerja Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tangerang Tahun 2025 diharapkan dapat meningkatkan kinerja sumber daya aparatur dalam memberikan layanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tangerang untuk menjawab peluang dan tantangan pembangunan daerah di Kabupaten Tangerang.

7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Tangerang Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disamping itu juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputuasn Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Perubahan terhadap rencana kerja dapat disebabkan oleh berbagai faktor, di antaranya perubahan kebijakan pemerintah, keterbatasan anggaran dan atau perubahan situasi dan kondisi yang mempengaruhi pelaksanaan rencana kerja tersebut. Selain itu, masukan dari masyarakat dan pemangku kepentingan juga dapat menjadi faktor yang mendorong terjadinya perubahan tersebut. Oleh karena itu, evaluasi dan penyesuaian rencana kerja secara berkala sangat penting untuk memastikan bahwa rencana tersebut tetap relevan dan efektif dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Perubahan Renja Perangkat Daerah dijadikan sebagai pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP), Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA-P) Perangkat Daerah dan kemudian berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA-P) melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kabupaten Tangerang.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Perubahan Renja BAPPEDA Kabupaten Tangerang tahun 2025 didasarkan pada :

1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4) Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817).

5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan.
6) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
8) Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025;
9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputuasn Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5589 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13) Surat Edaran Mendagri Nomor 900.1.1/640/SJ Tahun 2025 mengatur penyesuaian RKPD dan APBD 2025 guna menyelaraskan kebijakan daerah dengan kebijakan nasional serta meningkatkan efisiensi anggaran;
14) Surat Edaran Mendagri Nomor 900/833/SJ Tahun 2025 tertanggal 23 Februari 2025 terkait instruksi pemerintah daerah mengurangi belanja non-prioritas, perjalanan dinas, dan pengalihan anggaran;
15) Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 12);
16) Peraturan Bupati Tangerang Nomor 28 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas serta Tata Kerja pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang;
17) Peraturan Bupati Kabupaten Tangerang Nomor 39 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2023 Nomor 39).
18) Peraturan Bupati Tangerang Nomor 46 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024 – 2026;
19) Peraturan Bupati Tangerang Nomor 29 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2025;

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 dimaksudkan untuk memperkuat keterpaduan antara proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah. Perubahan ini bertujuan untuk menyesuaikan arah kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan tahun 2025 berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun sebelumnya.

Lebih lanjut, dokumen Perubahan Rencana Kerja BAPPEDA Kabupaten Tangerang Tahun 2025 disusun sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Prioritas serta Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun 2025. Dokumen ini juga menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA-P) yang pada akhirnya akan dituangkan dalam dokumen Perubahan APBD (P-APBD) Tahun Anggaran 2025.

Melalui penyesuaian ini, diharapkan perencanaan pembangunan dapat dilaksanakan secara lebih efisien, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan aktual, serta tetap selaras dengan arah dan prioritas pembangunan daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Renja BAPPEDA Kabupaten Tangerang disusun sesuai dengan sistematika penyajian yang tertera dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAPPEDA

BAB IV PENUTUP

.

BAB II
EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

BAPPEDA Kabupaten Tangerang mempunyai tugas membantu Bupati merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan serta melaksanakan fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan bidang perencanaan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas Pembantuan yang dibertikan kepada Pemerintah Daerah. Dengan demikian salah satu ketugasannya adalah mempersiapkan rumusan kebijakan teknis perencanaan, mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan daerah baik dengan Perangkat Daerah di tingkat Pemerintah Kabupaten Tangerang maupun dengan Pemerintah Provinsi Banten dan Pemerintah Pusat. BAPPEDA memiliki peran strategis dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan daerah melalui perencanaan makro dan sektoral yang berbasis data dan partisipatif. Secara rinci jenis pelayanan yang diberikan BAPPEDA adalah pemberian pemikiran strategis berbasis perencanaan yang meliputi :

1. Koordinasi Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang terpadu dan terukur (RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra, Renja, dan Rencana Aksi lainnya);
2. Perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan;
3. Fasilitasi dan koordinasi perencanaan lintas sektor (fasilitasi keterpaduan dan keserasian perencanaan pembangunan antar Pemerintah Pusat, provinsi dengan Kabupaten Tangerang) dan antar perangkat daerah;
4. Pelayanan informasi pembangunan berbasis data, termasuk sistem informasi perencanaan daerah dan Satu Data;
5. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah, termasuk indikator kinerja perangkat daerah dan capaian kinerja pembangunan;
6. Pelayanan fasilitasi perencanaan partisipatif (musrenbang, forum Perangkat Daerah, konsultasi publik lainnya);
7. Melaksanakan penelitian dan pengembangan serta fasilitasi inovasi daerah.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan tersebut diatas, BAPPEDA telah melakukan berbagai upaya yang dapat dilihat dengan beberapa hasil berikut :

1. Meningkatnya kualitas sistem perencanaan dengan terselenggaranya mekanisme perencanaan partisipatif sesuai dengan peraturan;
2. Meningkatnya intensitas keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan seperti masyarakat, DPRD, LSM, organisasi profesi, perguruan tinggi, dan sektor swasta lainnya;
3. Terselenggaranya Forum Konsultasi Publik Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah;
4. Memastikan konsistensi antara dokumen perencanaan dengan mekanisme penyusunan anggaran;

5. Meningkatnya intensitas pelaksanan pendampingan perencanaan, pengendalian inovasi di tingkat Kabupaten Tangerang oleh BAPPEDA dengan Perangkat Daerah terkait;
6. Meningkatnya pemanfaatan hasil kajian dalam kebijakan perencanaan.

Meningkatnya kualitas penyelenggaraan perencanaan tidak lepas dari meningkatnya kapasitas kelembagaan BAPPEDA meliputi kapasitas SDM, sarana dan prasarana serta sistem perencanaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, yang meliputi :

1. Peningkatan kompetensi aparatur perencana melalui pelatihan teknis, bimbingan teknis sistem informasi perencanaan, serta partisipasi dalam forum perencanaan nasional dan regional termasuk penempatan jabatan fungsional perencana secara strategis guna memperkuat peran kelembagaan dalam merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
2. Peningkatan sarana dan prasarana melalui pembaharuan infrastruktur kerja seperti ruang rapat tematik, sistem teknologi informasi internal (server dan perangkat kolaborasi daring), serta penyediaan akses perangkat keras bagi seluruh bidang-bidang teknis mendukung pelaksanaan tugas secara efisien dan akuntabel;
3. Penguatan Sistem Perencanaan melalui pelaksanaan dan fasilitasi forum multi stakeholders di bidang perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan lainnya;
4. Koordinasi perencanaan intern yang sinergi dan terpadu;
5. Pemanfaatan tehnologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan;
6. Penyediaan hasil-hasil kajian yang mendukung perencanaan serta fasilitasi/pendampingan inovasi daerah;
7. Kepatuhan terhadap Regulasi dan Standar Perencanaan dalam proses penyusunan dokumen perencanaan.

Pelaksanaan evaluasi terhadap rencana kerja merupakan elemen dalam proses pemantauan dan pengendalian program serta kegiatan yang melibatkan analisis atas capaian target yang telah ditetapkan dalam rencana kerja yang telah dirancang sebelumnya.

Pada awalnya, pagu murni Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2025 ditetapkan sebesar Rp46.902.616.111. Namun, seiring terbitnya arahan efisiensi dari Presiden Republik Indonesia dan Kementerian Dalam Negeri—sebagaimana tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ, serta Surat Edaran Nomor 900.1.1/640/SJ Tahun 2025—telah dilakukan penyesuaian terhadap pagu anggaran melalui pengurangan belanja non-prioritas. Dengan demikian, pagu anggaran BAPPEDA Tahun 2025 disesuaikan menjadi sebesar Rp43.143.127.351. Penyesuaian ini mencakup efisiensi pada beberapa pos belanja, antara lain:

1. Belanja Perjalanan Dinas
   Terdapat efisiensi anggaran dari pagu murni sebesar Rp1.750.018.000 menjadi Rp861.840.000, sehingga terjadi penghematan sebesar Rp888.178.000 atau setara dengan 50,75%.
2. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor – Bahan Cetak
   Dilakukan efisiensi dari pagu anggaran murni sebesar Rp2.445.056.930 menjadi Rp1.826.904.170, menghasilkan penghematan sebesar Rp618.152.760 atau 25,28%.
3. Honorarium Narasumber/Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia
   Efisiensi anggaran dilakukan dari pagu murni sebesar Rp1.142.850.000 menjadi Rp847.450.000, dengan pengurangan sebesar Rp295.400.000 atau 25,85%.
4. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan
   Terdapat penyesuaian anggaran dari pagu murni sebesar Rp173.950.000 menjadi Rp84.450.000, sehingga terjadi efisiensi sebesar Rp89.500.000 atau 51,45%.
5. Belanja Sewa Hotel
   Efisiensi dilakukan dari pagu murni sebesar Rp5.254.721.400 menjadi Rp3.977.290.400, mengalami efesiensi sebesar Rp1.277.431.000 atau 24,31%.

Kebijakan efisiensi ini dilaksanakan sebagai bentuk penyesuaian fiskal dalam rangka mendukung pengelolaan keuangan daerah yang lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil.

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) BAPPEDA Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2025 sampai dengan Triwulan I dilakukan terhadap realisasi pelaksanaan 4 (empat) program, 17 (tujuh belas) kegiatan, dan 51 (lima puluh satu) sub kegiatan. Evaluasi ini mencakup baik program, kegiatan, dan sub kegiatan utama yang merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Bupati, maupun program, kegiatan, dan sub kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun. Seluruh program dan kegiatan tersebut didanai sepenuhnya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tangerang yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU), dengan total alokasi anggaran sebesar Rp43.143.127.351. Hingga tanggal 31 Maret 2025, realisasi anggaran mencapai Rp7.491.675.965 atau sebesar 17,36%, dengan rincian sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian Urusan, Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)				
		Anggaran Murni	Anggaran setelah effisiensi	Realisasi Anggaran s.d Triw 1 (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	% Serapan
1	2	3	4	5	6	7
5.01.5.05.0.00.01.0000	**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**	**46.902.646.111**	**43,143,127,351**	**7,491,675,965**	**35,651,451,386**	**17.36**
5.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA**	**23.549.313.821**	**22,535,895,021**	**5,040,695,875**	**17,495,199,146**	**22.37**
5.01.01.2.01	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI	248.395.600	188,988,600	-	188,988,600	0.00

Kode Rekening	Uraian Urusan, Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)				
		Anggaran Murni	Anggaran setelah effisiensi	Realisasi Anggaran s.d Triw 1 (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	% Serapan
	KINERJA PERANGKAT DAERAH					
5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	62.414.600	46,676,600	-	46,676,600	0.00
5.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	31.683.000	23,212,000	-	23,212,000	0.00
5.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	154.298.000	119,100,000	-	119,100,000	0.00
5.01.01.2.02	**ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH**	**14.475.704.543**	**14,448,987,543**	**3,867,044,957**	**10,581,942,586**	**26.76**
5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.365.867.543	14,365,867,543	3,867,044,957	10,498,822,586	26.92
5.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	26.702.000	19,124,000	-	19,124,000	0.00
5.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	83.135.000	63,996,000	-	63,996,000	0.00
5.01.01.2.05	**ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH**	**615.280.600**	**555,987,800**	**-**	**555,987,800**	**0.00**
5.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	303.424.600	303,424,600	-	303,424,600	0.00
5.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	311.856.000	252,563,200	-	252,563,200	0.00
5.01.01.2.06	**ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH**	**3.965.493.100**	**3,133,091,100**	**550,778,500**	**2,582,312,600**	**17.58**
5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasirnnListrik/Penerangan Bangunan Kantor	69.240.000	69,240,000	40,185,000	29,055,000	58.04
5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.218.001.000	1,218,001,000	-	1,218,001,000	0.00
5.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	83.576.700	83,576,700	36,832,000	46,744,700	44.07
5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	419.013.000	419,013,000	374,715,000	44,298,000	89.43
5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	179.312.000	145,652,000	47,400,000	98,252,000	32.54
5.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	259.700.000	259,700,000	50,766,500	208,933,500	19.55
5.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	199.526.400	164,876,400	880	164,875,520	0.00
5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.537.124.000	773,032,000	-	773,032,000	0.00

Kode Rekening	Uraian Urusan, Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)				
		Anggaran Murni	Anggaran setelah effisiensi	Realisasi Anggaran s.d Triw 1 (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	% Serapan
5.01.01.2.07	**PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**	**565.755.200**	**565,755,200**	**-**	**565,755,200**	**0.00**
5.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	565.755.200	565,755,200	-	565,755,200	0
5.01.01.2.08	**PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**1.831.150.202**	**1,795,550,202**	**394,193,257**	**1,401,356,945**	**21.95**
5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	314.926.634	314,926,634	39,273,257	275,653,377	12.47
5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.516.223.568	1,480,623,568	354,920,000	1,125,703,568	23.97
5.01.01.2.09	**PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**1.847.534.576**	**1,847,534,576**	**228,679,161**	**1,618,855,415**	**12.38**
5.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	525.784.576	525,784,576	37,639,161	488,145,415	7.16
5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	44.500.000	44,500,000	-	44,500,000	0.00
5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.277.250.000	1,277,250,000	191,040,000	1,086,210,000	14.96
5.01.02	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**6.883.507.530**	**5,661,006,020**	**982,265,200**	**4,678,740,820**	**17.35**
5.01.02.2.01	PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENDANAAN	4.019.388.200	3,358,481,000	294,920,000	3,063,561,000	8.78
5.01.02.2.02	ANALISIS DATA DAN INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	941.186.230	888,310,020	71,486,600	816,823,420	8.05
5.01.02.2.03	PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.922.933.100	1,414,215,000	615,858,600	798,356,400	43.55
5.01.03	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**12.822.943.960**	**11,616,295,210**	**825,108,890**	**10,791,186,320**	**7.10**
5.01.03.2.01	KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN	3.520.271.650	2,999,160,650	231,673,890	2,767,486,760	7.72

Kode Rekening	Uraian Urusan, Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)				
		Anggaran Murni	Anggaran setelah effisiensi	Realisasi Anggaran s.d Triw 1 (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	% Serapan
	PEMBANGUNAN MANUSIA					
5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	856.591.200	749,431,200	28,435,000	720,996,200	3.79
5.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	386.247.000	281,029,000	17,449,000	263,580,000	6.21
5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1.855.751.450	1,657,253,450	159,249,890	1,498,003,560	9.61
5.01.03.2.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	421.682.000	311,447,000	26,540,000	284,907,000	8.52
5.01.03.2.02	**KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEREKONOMIAN DAN SDA (SUMBER DAYA ALAM)**	**5.078.455.750**	**4,618,862,000**	**524,280,000**	**4,094,582,000**	**11.35**
5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2.528.577.350	2,293,926,000	263,525,000	2,030,401,000	11.49
5.01.03.2.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	241.646.000	241,188,000	3,650,000	237,538,000	1.51
5.01.03.2.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2.062.444.000	1,888,425,000	253,455,000	1,634,970,000	13.42
5.01.03.2.02.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	245.788.400	195,323,000	3,650,000	191,673,000	1.87

Kode Rekening	Uraian Urusan, Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)				
		Anggaran Murni	Anggaran setelah effisiensi	Realisasi Anggaran s.d Triw 1 (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	% Serapan
5.01.03.2.03	**KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN**	**4.224.216.560**	**3,998,272,560**	**69,155,000**	**3,929,117,560**	**1.73**
5.01.03.2.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1.679.515.560	1,587,190,560	28,240,000	1,558,950,560	1.78
5.01.03.2.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	260.060.000	235,058,000	5,110,000	229,948,000	2.17
5.01.03.2.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2.016.431.000	1,940,134,000	27,775,000	1,912,359,000	1.43
5.01.03.2.03.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	268.210.000	235,890,000	8,030,000	227,860,000	3.40
5.05.02	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**3.646.880.800**	**3,329,931,100**	**643,606,000**	**2,686,325,100**	**19.33**
5.05.02.2.01	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PENGKAJIAN PERATURAN**	**569.727.000**	**548,987,000**	**174,644,000**	**374,343,000**	**31.81**
5.05.02.2.01.0001	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	154.399.000	154,399,000	-	154,399,000	0.00
5.05.02.2.01.0005	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	160.894.000	160,894,000	160,894,000	-	100.00
5.05.02.2.01.0014	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	254.434.000	233,694,000	13,750,000	219,944,000	5.88
5.05.02.2.02	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG SOSIAL DAN KEPENDUDUKAN**	**786.763.000**	**786,763,000**	**326,702,000**	**460,061,000**	**41.52**
5.05.02.2.02.0003	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	268.648.000	268,648,000	159,606,000	109,042,000	59.41

Kode Rekening	Uraian Urusan, Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)				
		Anggaran Murni	Anggaran setelah effisiensi	Realisasi Anggaran s.d Triw 1 (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	% Serapan
5.05.02.2.02.0010	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	518.115.000	518,115,000	167,096,000	351,019,000	32.25
5.05.02.2.03	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN**	**898.747.000**	**836,477,700**	**142,260,000**	**694,217,700**	**17.01**
5.05.02.2.03.0001	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	144.620.000	144,620,000	142,260,000	2,360,000	98.37
5.05.02.2.03.0003	Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	184.023.000	167,203,600	-	167,203,600	0.00
5.05.02.2.03.0004	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	153.869.000	137,075,800	-	137,075,800	0.00
5.05.02.2.03.0006	Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	174.293.000	157,221,300	-	157,221,300	0.00
5.05.02.2.03.0008	Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	125.239.000	118,180,000	-	118,180,000	0.00
5.05.02.2.03.0011	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	116.703.000	112,177,000	-	112,177,000	0.00
5.05.02.2.04	**PENGEMBANGAN INOVASI DAN TEKNOLOGI**	**1.391.643.800**	**1,157,703,400**	**-**	**1,157,703,400**	**0.00**
5.05.02.2.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1.087.276.000	929,400,800	-	929,400,800	0.00
5.05.02.2.04.0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	186.984.800	139,998,600	-	139,998,600	0.00
5.05.02.2.04.0005	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	117.383.000	88,304,000	-	88,304,000	0.00

Berikut adalah hasil pengendalian pelaksanaan Renja BAPPEDA Kabupaten Tangerang sampai dengan Triwulan I tahun 2025 :

1. PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH

   Program ini merupakan jenis belanja operasi yang dilaksanakan melalui 3 (tiga) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan. Program ini mempunyai tolok ukur Nilai Komponen Perencanaan Kinerja dengan target yang ingin dicapai pada tahun 2025 adalah nilai 26 serta Nilai Komponen Pengukuran Kinerja dengan nilai 23,4.

   Realisasi keuangan sampai dengan triwulan I adalah Rp.982,265,200 dari pagu anggaran Rp.5,661,006,020 (17,35%). Berikut rincian kegiatan yang menunjang program ini :

   1.1 Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan, dengan sub kegiatan :

      1.1.1 Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan

Daerah Kabupaten/Kota. Hingga Triwulan I, realisasi penyerapan anggaran mencapai Rp294.920.000, atau sekitar 8,78% dari pagu awal. Untuk triwulan I realisasi fisik sub kegiatan ini mencapai 5%. Pada periode ini, belum terdapat dokumen hasil realisasi kinerja yang dihasilkan, karena berdasarkan perjanjian kinerja, penyusunan dokumen tersebut dijadwalkan untuk diselesaikan pada Triwulan II. Penyesuaian anggaran ini akan dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Perubahan.

1.2 Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan sub kegiatan :

1.2.1 Sub kegiatan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan mencatat penyerapan anggaran pada Triwulan I sebesar 8,045% dari total pagu yang tersedia, dan realisasi fisik sebesar 8,16%. Meskipun realisasi anggaran hingga Triwulan I masih tergolong rendah, kegiatan ini diarahkan untuk menunjang capaian output yang telah direncanakan. Output tersebut meliputi Laporan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah, Analisis Indikator Makro Daerah Kabupaten Tangerang, Evaluasi Data dan Informasi Pembangunan Daerah, Evaluasi Penyelenggaraan Satu Data Indonesia (SDI) tingkat Kabupaten Tangerang, Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Daerah Kabupaten Tangerang, serta penyusunan Rencana Aksi SDI Tahun 2025–2029.

1.3 Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah, dengan sub kegiatan:

1.3.1 Sub Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah mengalami penyesuaian pagu dari semula sebesar Rp1.414.215.000, dengan realisasi penyerapan anggaran hingga Triwulan I sebesar Rp615.858.600, atau setara dengan 43,54% dari pagu awal dan realisasi fisik sebesar 40,67%. Sisa pagu yang belum terserap diharapkan akan mendukung pelaksanaan kegiatan pada triwulan berikutnya. Output yang hendak dicapai dari sub kegiatan ini meliputi: Penyusunan, pengadaan dan pencetakan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2024, Laporan Evaluasi Kebijakan Program Semester I dan II, Laporan Monitoring dan Evaluasi, Laporan MRI (Monitoring Realisasi Intervensi) Tahunan, Visualisasi Program Pembangunan Tahun 2025, Evaluasi E-SAKIP, Evaluasi Kinerja Penjabat Bupati, Evaluasi RKPD, serta Visualisasi Program Pembangunan Tahun 2025. Seluruh output ini diarahkan untuk memperkuat fungsi pengendalian dan pelaporan sebagai bagian integral dari siklus perencanaan pembangunan daerah.

2. PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Program ini merupakan jenis belanja operasi yang dilaksanakan melalui 3 (tiga) kegiatan dan 12 (dua belas) sub kegiatan. Program ini mempunyai tolok ukur yang sama dengan Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Realisasi keuangan sampai dengan triwulan I adalah Rp. 825,108,890 dari pagu keseluruhan sebesar Rp.11,616,295,210 (7,1%) dengan realisasi fisik sebesar 7.84%. Adapun rincian kegiatan pada program ini adalah :

2.1 Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, dengan sub kegiatan :

2.1.1 Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) mengalami penyesuaian pagu dari semula sebesar Rp749.431.200. Hingga Triwulan I, realisasi keuangan tercatat sebesar Rp28.435.000 atau sekitar 3,79% dari pagu awal, sementara realisasi fisik kegiatan telah mencapai 3,56%. Output yang dihasilkan dari kegiatan ini antara lain Dokumen Renja PD lingkup bidang Pemerintahan serta Berita Acara Pembahasan Renja PD lingkup pemerintahan. sampai dengan triwulan 1 Tahun 2025 telah menyelesaikan 2 dokumen atau (25%) dari 8 dokuemn yang di targetkan pada tahun 2025 yaitu dokumen Dokumen KKP HAM dan Dokumen Renja Bidang Pemerintahan. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan adalah sulitnya sinkronisasi waktu dengan perangkat daerah pada awal tahun anggaran. Sebagai solusi, telah dilakukan desk secara bertahap dengan masing-masing perangkat daerah guna menyesuaikan jadwal dan memastikan kelancaran proses perencanaan.

2.1.2 Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan memiliki pagu awal sebesar Rp281.029.000. Sampai dengan triwulan 1 Tahun 2025 telah menyelesaikan 1 kegiatan atau (20%) dari 5 kegiatan yang di targetkan tahun 2025 yaitu Dokumen Monev OPD Bidang Pemerintahan. Hingga Triwulan I, realisasi penyerapan anggaran mencapai Rp17.449.000 atau sekitar 6,21% dari pagu semula, dengan realisasi fisik sebesar 4,52%. Output Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pemantauan dan penguatan kualitas dokumen perencanaan pada perangkat daerah di lingkup pemerintahan.

2.1.3 Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) memiliki pagu awal sebesar Rp311.447.000. Hingga Triwulan I, realisasi penyerapan anggaran mencapai

Rp26.540.000 atau sekitar 8,52%, dengan realisasi fisik sebesar 8,58%. Output dari sub kegiatan ini yaitu telah mencapai 2 dokumen dari 8 dokumen yang di targetkan tahun 2025. Adapun dokumen yang disusun yaitu RAT dan Dokumen Renja Bidang Pembangunan Manusia. Indikator dari kegiatan ini meliputi koordinasi bidang Pembangunan Manusia, Koordinasi TPPS (Tim Percepatan Penurunan Stunting), TKPK/Gebrak Tegas, TP KTS, TP UKS/M, serta penguatan Tim Driver–Pokja PUG/Gugus Tugas KLA. Kegiatan ini ditujukan untuk memastikan sinergi lintas sektor dalam perencanaan pembangunan manusia yang komprehensif dan responsif terhadap isu-isu prioritas daerah.

2.1.4 Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia memiliki pagu awal sebesar Rp311.447.000. Sampai dengan triwulan 1 tahun 2025 telah telah menyelesaikan 1 kegiatan atau (20%) dari 5 kegaiatan yang di targetkan tahun 2025 yaitu Dokumen Monev Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia. Realisasi penyerapan anggaran mencapai Rp26.540.000 atau sekitar 8,52%, dengan realisasi fisik sebesar 6,29%.

2.2 Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam), dengan sub kegiatan :

2.2.1 Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) mengalami penyesuaian pagu dari semula sebesar Rp2.293.926.000. Hingga Triwulan I, realisasi penyerapan anggaran tercatat sebesar Rp263.525.000 atau sekitar 11,49% dari pagu semula, dan realisasi fisik mencapai 13,53%. Output yang telah dilaksanakan berupa tersusunnya laporan kegiatan asistensi terhadap rancangan awal Renstra Perangkat Daerah bidang perekonomian

2.2.2 Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian mengalami penyesuaian pagu dari semula sebesar Rp241.188.000. Hingga Triwulan I, realisasi penyerapan anggaran tercatat sebesar Rp3.650.000 atau sekitar 1,51% dari pagu semula, dan realisasi fisik mencapai 4,64%. Output yang telah dilaksanakan berupa laporan kegiatan monev terhadap rencana kerja Perangkat Daerah bidang perekonomian

2.2.3 Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya Alam (RPJPD, RPJMD dan RKPD) mengalami penyesuaian pagu dari semula sebesar Rp1.888.425.000. Hingga Triwulan I, realisasi penyerapan anggaran tercatat sebesar Rp253.455.000 atau sekitar 13,42% dari pagu semula, dan realisasi

fisik mencapai 22,07%. Output yang telah dilaksanakan berupa tersusunnya laporan kegiatan asistensi terhadap rancangan awal Renstra Perangkat Daerah bidang Sumber Daya Alam.

2.2.4 Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Sumber Daya Alam mengalami penyesuaian pagu dari semula sebesar Rp195.323.000. Hingga Triwulan I, realisasi penyerapan anggaran tercatat sebesar Rp3.650.000 atau sekitar 1,87% dari pagu semula, dan realisasi fisik mencapai 4,56%. Output yang telah dilaksanakan berupa tersusunnya laporan kegiatan asistensi terhadap rancangan awal Renstra Perangkat Daerah bidang Sumber Daya Alam.

2.3 Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, dengan pelaksanaan 4 sub kegiatan,

2.3.1 Sub Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mengalami penyesuaian pagu dari semula sebesar Rp1.587.190.560. Hingga Triwulan I, realisasi penyerapan anggaran mencapai Rp28.240.000 atau sekitar 1,78% dari pagu semula dan realisasi fisik mencapai 6,69%. Output pada Triwulan I sampai saat ini adalah telah terlaksananya rapat koordinasi bidang infrastruktur dengan output SK Tim pelaksana kegiatan, yang berperan dalam menunjang progres pelaksanaan kegiatan pada triwulan-triwulan selanjutnya.

2.3.2 Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur mengalami penyesuaian pagu dari semula sebesar Rp235.058.000 dan realisasi fisik mencapai 1,96%. Hingga Triwulan I, realisasi penyerapan anggaran tercatat sebesar Rp5.110.000 atau sekitar 2,17% dari pagu semula . Output pada Triwulan I sampai saat ini adalah telah terlaksananya rapat monitoring dan evaluasi terkait pemantauan kinerja perangkat daerah lingkup bidang infrastruktur, dengan output SK Tim pelaksana kegiatan yang mendukung capaian target pada triwulan berikutnya.

2.3.3 Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) mengalami penyesuaian pagu dari semula sebesar Rp1.940.134.000. Hingga Triwulan I, realisasi penyerapan anggaran tercatat sebesar Rp27.775.000 atau sekitar 1,43% dari pagu semula dan realisasi fisik mencapai 13,03%. Output pada Triwulan I sampai saat ini adalah telah terlaksananya rapat koordinasi bidang kewilayahan, dengan output SK Tim pelaksana kegiatan

yang mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan pada triwulan berikutnya.

2.3.4 Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan mengalami penyesuaian pagu dari semula sebesar Rp235.890.000. Hingga Triwulan I, realisasi penyerapan anggaran mencapai Rp8.030.000 atau sekitar 3,40% dari pagu semula dan realisasi fisik mencapai 4,67%. Output kegiatan ini pada Triwulan I adalah terlaksananya monitoring dan evaluasi bidang kewilayahan yang telah mencakup 29 kecamatan, sebagai bagian dari upaya mendorong pencapaian progres pada triwulan selanjutnya.

3. PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Realisasi Program dan Kegiatan pada Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2025, jumlah alokasi anggaran Triwulan 1 dengan pagu anggaran Rp. 3,329,931,100 dengan realisasi sebesar Rp. 643,606,000 atau sebesar 19,32%. Capaian atas target kinerja triwulan I, mencapai angka 40% %

Maing-masing indikator kinerja tersebut adalah telah dilakukan Rapat pelaksanaan pada kajian: (a) Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan; (b) Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan; (c) Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan; (d) Pengembangan Inovasi dan Teknologi; diantaran capaian yang telah dilakukan adalah :

1. Melaksanakan Rapat Persiapan pelaksanaan: (a) Dokumen Kajian Potensi Ekonomi Tangerang Bagian Utara, (b) Dokumen Kajian Sekolah Inklusif dan Boarding School SMP bagi MBR, dan (c) Laporan Fasilitasi & Evaluasi Data Kelitbangan & Peraturan Laporan Koordinasi Kelitbangan Antar Peneliti Perguruan Tinggi.

2. Melaksanakan Rapat Ekposes Laporan Akhir pada Kajian: a) Dokumen Kajian Indeks Pembangunan Pemuda di Kabupaten Tangerang dan Dokumen Kajian Indeks Pembangunan Kebudayaan; (b) Dokumen Kajian Indeks Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Tangerang; Dokumen Kajian Indeks Kesalehan Sosial; Dokumen Kajian Pusat Inovasi Pembangunan Pemuda; Dokumen Kajian Pusat Trauma Healing Training Center;

3. Melaksanakan Rapat Ekposes Laporan Akhir pada Kajian: a) Dokumen Penyusunan Dokumen Kabupaten Tangerang Kreatif; (b) Dokumen Kajian Evaluasi Kawasan Puskagro dan Ketapang Urban Aquaculture; (c) Dokumen Kajian Pengembangan Komuditas Kemiri dan Serai; (d) Dokumen Kajian Indeks Ekonomi Hijau Wilayah Kabupaten Tangerang; (e) Dokumen Kajian Indek Ketutupan Lahan; (f) Dokumen Kajian Indeks Layanan Kepuasan Infrastruktur

4. Target dalam kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi yang telah ditetapkan antar lain: adalah dokumen hasil Rapat Ekposes

Laporan Awal/Pendahuluan dan Akhir pada Kajian: a) Laporan Kegiatan Sosialisasi dan Pendampingan Inovasi Daerah; Laporan Kegiatan Bimtek Branding dan Marketing Inovasil; Laporan Kegiatan imtek Penyusunan Proposal Inovasi; Laporan Kegiatan Bimtek Reflikasi, Kerjasama dan HAKI Inovasi; Laporan Kegiatan Sosialisasi dan Pendampingan Penginputan IGA Award; Laporan Kegiatan Lomba Inovasi - Laporan Kegiatan Gelar Karya Inovasi Gemilang EXPO2025 (b) Laporan Kegiatan Diseminasi I - Laporan Kegiatan Diseminasi II; (c) Laporan Kegiatan Sosialisasi Aplikasi SI RISDA- Laporan Kegiatan Bimtek Aplikasi SI RISDA.

- Program dan Kegiatan Rutin

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
   1.1 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

   Pagu awal untuk Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah adalah sebesar Rp46.676.600. Hingga akhir Triwulan I, belum terdapat realisasi anggaran pada sub kegiatan ini. Hal ini disebabkan karena belum terinputnya data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada Aplikasi SIMRAL, yang mengakibatkan nilai realisasi anggaran masih tercatat nol (0). Namun, secara faktual, kegiatan ini telah mengalami pencairan anggaran pada Triwulan I. Realisasi fisik telah mencapai 21,28%. Pencatatan pencaian anggaran pada sub kegiatan ini masuk pada triwulan berikutnya untuk mendukung penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah. Dokumen-dokumen tersebut menjadi acuan penting dalam pelaksanaan program dan kegiatan agar lebih terarah, efektif, dan sesuai dengan sasaran pembangunan daerah. Beberapa output dari pelaksanaan sub kegiatan ini antara lain adalah penyediaan Dokumen Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), tersusunnya dokumen perencanaan tahun berikutnya seperti rancangan awal Rencana Strategis (Renstra), rancangan awal Rencana Kerja (Renja) 2026, serta pelaksanaan Forum Penyusunan Renja 2026.

   1.2 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Pagu anggaran untuk Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar adalah sebesar Rp23.212.000, dan hingga akhir Triwulan I secara pembukuan akuntansi tercatat belum terdapat realisasi anggaran untuk sub kegiatan ini dikarenakan keterlambatan dalam mengajuan pencairan sehingga angkas triwulan I tercatat pada LRA triwulan 2 (April). Namun realisasi fisik pada sub kegiatan ini mencapai 30,13 pada

triwulan I. Beberapa renaksi yang telah dilaksanakan antara lain rapat koordinasi penyusunan laporan monev dan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi dengan output dari pelaksanaan sub kegiatan ini adalah tersusunnya Laporan Monitoring dan Evaluasi (Monev) serta Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2024.

1.3 Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Anggaran yang dialokasikan untuk sub kegiatan ini adalah sebesar Rp119.100.000. seperti halnya 2 sub kegitan tersebut diatas, hingga akhir Triwulan I, secara pembukuan akuntansi tercatat belum terdapat realisasi anggaran untuk sub kegiatan ini dikarenakan keterlambatan dalam mengajuan pencairan sehingga angkas triwulan I tercatat pada LRA triwulan 2 (April). Namun realisasi fisik renaksi yang harus dilaksanakan pada triwulan I telah dilaksanakan sesuai jadwal MENCAPAI 6,65%. Beberapa output dari pelaksanaan sub kegiatan ini antara lain adalah Dokumen Manajemen Risiko Tahun 2025 dan evaluasi oleh Inspektorat, Laporan Evaluasi Kinerja Tw 4 Tahun 2024, Laporan Renja Tahun 2025 triwulan I.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :

2.1 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Dialokasikan pagu anggaran sebesar Rp14.365.867.543, dengan realisasi fisik 32,50% dan realisasi anggaran hingga Triwulan I sebesar Rp3.867.044.957. Output dari subkegiatan ini adalah laporan berkas gaji dan laporan TPBK Januari sampai dengan Maret 2025.

2.2 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Belum terdapat realisasi anggaran hingga Triwulan I. Sub kegiatan ini bertujuan untuk penyusunan laporan keuangan akhir tahun sebagai bentuk akuntabilitas pengelolaan anggaran perangkat daerah dari pagu Rp. 19,124,000.

2.3 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Dengan pagu awal sebesar Rp63.996.000, belum terdapat realisasi anggaran hingga Triwulan I, namun realisasi fisik sub kegiatan berikut mencapai 22,91%. Subkegiatan ini mendukung penyusunan laporan keuangan berkala sebagai bagian dari pelaporan dan pemantauan kinerja anggaran. Beberapa output yang telah tersedia antara lain Buku Kas Umum dan laporan keuangan Triwulan I.

3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian, dengan sub kegiatan :

3.1 Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Dialokasikan anggaran sebesar Rp303.424.600. Hingga Triwulan I, belum ada realisasi anggaran. Kegiatan ini bertujuan untuk pengadaan pakaian dinas dan kelengkapannya bagi ASN.

3.2 Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dengan pagu sebesar Rp252.563.200, belum terdapat realisasi anggaran hingga Triwulan I. Kegiatan ini mendukung peningkatan kompetensi pegawai sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah terdiri dari 8 sub kegiatan, dengan total pagu anggaran sebesar Rp3.133.091.100. Hingga akhir Triwulan I, realisasi penyerapan anggaran mencapai Rp550.778.500 atau sebesar 17,58% dari total pagu dengan realisasi fisik sebesar 44,72%. Kegiatan yang telah dilaksanakan meliputi penyediaan peralatan komponen listrik gedung kantor, kebutuhan alat tulis kantor (ATK), barang cetakan, bahan bacaan seperti koran dan majalah, serta fasilitasi kunjungan tamu dan perjalanan dinas dalam rangka koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi BAPPEDA. Seluruh pelaksanaan kegiatan telah disesuaikan dengan jadwal Anggaran Kas Triwulan I. Adapun sisa anggaran merupakan belanja untuk kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan berikutnya, sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang telah direncanakan. Penyesuaian terhadap kegiatan dan anggaran akan dilakukan dalam dokumen Renja Perubahan.
5. Kegiatan ini terdiri atas sub kegiatan Pengadaan Mebel, dengan total pagu anggaran sebesar Rp565.755.200. Hingga akhir Triwulan I, belum terdapat realisasi fisik maupun realisasi penyerapan anggaran pada sub kegiatan ini. Hal ini disebabkan karena pelaksanaan pengadaan dijadwalkan pada Triwulan II, sesuai dengan rencana penganggaran dan jadwal pelaksanaan yang telah ditetapkan, dan saat ini terdapat perubahan dalam perencanaan belanja, yang selanjutnya akan disesuaikan dalam dokumen Renja Perubahan.
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah memiliki pagu anggaran sebesar Rp1.795.550.202 dengan realisasi anggaran sampai Triwulan I sebesar Rp394.193.257 atau sebesar 21,96% dan Realisasi fisik sebesar 27,43%. Realisasi ini berasal dari pelaksanaan sub kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik serta penyediaan jasa pelayanan umum kantor. Kegiatan ini berjalan sesuai dengan jadwal dan mendukung kelancaran operasional kantor dalam pemenuhan kebutuhan layanan utilitas serta dukungan pelayanan umum lainnya.
7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah memiliki pagu sebesar Rp1.847.534.576 dengan realisasi anggaran hingga Triwulan I sebesar Rp228.679.161 atau sebesar 12,38% dan realisasi fisik sebesar 24,24%. Realisasi ini meliputi pelaksanaan kegiatan pemeliharaan, biaya pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional/lapangan, pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya, serta pemeliharaan atau rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya. Kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan jadwal pemeliharaan yang ditetapkan.

Evaluasi program, kegiatan dan sub kegiatan seperti tertera pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Bappeda sampai dengan triwulan I
Tahun 2025

Kode Rekening	Uraian Urusan, Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target kinerja dan anggaran Renja Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2025 (%)		Keterangan
						I		II		III		IV						
				Target	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+7+8+9	10=6+7+8+9	11=(10/5)*100		12
5.01.5.05.0.00.01.0000	***Badan Perencanaan Pembangunan Daerah***				***43.143.127.351***													
5,01	***Perencanaan***																	
5.01.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase pemenuhan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**		**100**	**22.535.895.021**		**5.040.695.875**								**5.040.695.875**	**22,37**		
5.01.01.2.01	*Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*dokumen*	*22*	*188.988.600*	*9*	-							*9*	-	*41*		
5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	10	46.676.600	4	-							4	-	40,00	-	
5.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan	5	23.212.000	2	-							2	-	40,00	-	
5.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan	8	119.100.000	3	-							3	-	37,50	-	

Kode Rekening	Uraian Urusan, Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target kinerja dan anggaran Renja Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2025 (%)		Keterangan
						I		II		III		IV						
				Target	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
5.01.01.2.02	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*Jumlah Dokumen Adminstrasi Keuangan*	*dokumen*	*3*	*14.448.987.543*	*2*	*3.867.044.957*							*2*	*3.867.044.957*			
5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	47	14.365.867.543	75 orang/bulan	3.867.044.957							75 orang/bulan	3.867.044.957	100,00	26,92	
5.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	laporan	1	19.124.000	-	-							-	-		-	
5.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	laporan	6	63.996.000	1	-							1	-	16,67	-	
5.01.01.2.05	*Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	*Jumlah Dokumen Pembinaan Pegawai*	*dokumen*	*2*	*555.987.800*	-	-							-	-	-		
5.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	paket	4	303.424.600	-	-							-	-	-	-	
5.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang	47	252.563.200	-	-							-	-	-	-	
5.01.01.2.06	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*dokumen*	*8*	*3.133.091.100*	*6*	*550.778.500*							*6*	*550.778.500*	-		
5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	8	69.240.000	4	40.185.000							4	40.185.000	50,00	58,04	

Kode Rekening	Uraian Urusan, Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target kinerja dan anggaran Renja Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2025 (%)		Keterangan
						I		II		III		IV						
				Target	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	5	1.218.001.000	-	-							-	-	-	-	
5.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	22	83.576.700	-	36.832.000							-	36.832.000	-	44,07	
5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	17	419.013.000	17	374.715.000							17	374.715.000	100,00	89,43	
5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket	7	145.652.000	7	47.400.000							7	47.400.000	100,00	32,54	
5.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dokumen	5	259.700.000	4	50.766.500							4	50.766.500	80,00	19,55	
5.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	laporan	94	164.876.400	23	880.000							23	880.000	24,47	0,53	
5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	120	773.032.000	19	-							19	-	15,83	-	
5.01.01.2.07	*Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	*Jumlah dokumen Barang Milik Daerah*	*dokumen*	*1*	*565.755.200*	-	-							-	-	-		
5.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	paket	2	565.755.200	-	-							-	-	-	-	
5.01.01.2.08	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Jumlah Dokumen Jasa Penunjang Urusan Pemda*	*dokumen*	*2*	*1.795.550.202*	*2*	*394.193.257*							*2*	*394.193.257*	-		
5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	12	314.926.634	3	39.273.257							3	39.273.257	25,00	12,47	

Kode Rekening	Uraian Urusan, Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target kinerja dan anggaran Renja Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2025 (%)		Keterangan
						I		II		III		IV						
				Target	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor yang Disediakan	laporan	12	1.480.623.568	3	354.920.000							3	354.920.000	25,00	23,97	
5.01.01.2.09	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Jumlah Dokumen Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*dokumen*	*3*	*1.847.534.576*	*2*	*228.679.161*							*2*	*228.679.161*	-		
5.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	26	525.784.576	26	37.639.161							26	37.639.161	100,00	7,16	
5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	75	44.500.000	16	-							16	-	21,33	-	
5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	1	1.277.250.000	-	191.040.000							-	191.040.000	-	14,96	
5.01.02	**Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah**	**Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Tepat Waktu**	**persen**	**100**	**3.358.481.000**	**-**	**294.920.000**							**-**	**294.920.000**	**-**		
5.01.02.2.01	*Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan*	*Ditetapkannya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota*	*dokumen*	*10*	*3.358.481.000*	*-*	*294.920.000*							*-*	*294.920.000*	-		
5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan	Ditetapkannya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	dokumen	10	3.358.481.000	-	294.920.000							-	294.920.000	-	8,78	

Kode Rekening	Uraian Urusan, Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target kinerja dan anggaran Renja Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2025 (%)		Keterangan
						I		II		III		IV						
				Target	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota																	
		Prosentase Ketersedian Data Pembangunan	**persen**	**66**	**888.310.020**	**25**	**71.486.600**							**25**	**71.486.600**	**-**		
5.01.02.2.02	*Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah*	*Jumlah Dokumen Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan*	*dokumen*	*5*	*888.310.020*	-	*71.486.600*							-	*71.486.600*	-		
5.01.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan	dokumen	5	888.310.020	-	71.486.600							-	71.486.600		8,05	
		Persentase Dokumen Pelaporan dan Pengendalian Perencanaan Pembangunan	**persen**	**100**	**1.414.215.000**	**30**	**615.858.600**							**30**	**615.858.600**	**-**		
5.01.02.2.03	*Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah*	*Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah*	*10 laporan*	*10*	*1.414.215.000*	*3*	*615.858.600*							*3*	*615.858.600*	*3*		
5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	10 laporan	*10*	1.414.215.000	3	615.858.600							3	615.858.600	30,00	43,55	
5.01.03	**Program Koordinasi dan Sinkronisasi Pembangunan Daerah**				**11.616.295.210**	**-**	**825.108.890**							**-**				

Kode Rekening	Uraian Urusan, Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target kinerja dan anggaran Renja Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2025 (%)		Keterangan
						I		II		III		IV						
				Target	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		% Penjabaran Konsistensi Program RPJMD dan RKPD kedalam APBD lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia **% PD dengan kinerja baik lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**persen**	**100**	**2.999.160.650**	**-**	**231.673.890**							**-**	**231.673.890**	**-**		
5.01.03.2.01	*Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia*	*Jumlah Dokumen Perencanaan PD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia*	*dokumen*	*16*	*2.999.160.650*	*6*	*231.673.890*							*6*	*231.673.890*	-		
		Jumlah dokumen evaluasi kinerja PD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	*dokumen*	*4*		-								-	-	-		
5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	dokumen	4	749.431.200	2	28.435.000							2	28.435.000	50,00	3,79	
5.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	laporan	4	281.029.000	1	17.449.000							1	17.449.000	25,00	6,21	
5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	dokumen	2	1.657.253.450	2	159.249.890							2	159.249.890	50,00	9,61	

Kode Rekening	Uraian Urusan, Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target kinerja dan anggaran Renja Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2025 (%)		Keterangan
						I		II		III		IV						
				Target	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																	
5.01.03.2.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	Perangkat Daerah	7	311.447.000	1	26.540.000							1	26.540.000	50,00	8,52	
		% Penjabaran Konsistensi Program RPJMD dan RKPD kedalam APBD lingkup Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) **% PD dengan kinerja baik lingkup Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	**persen**	**100**	**4.618.862.000**		**524.280.000**							**0**	**524.280.000**	**-**		
5.01.03.2.02	*Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)*	*Jumlah Dokumen Perencanaan PD Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)*	*dokumen*	*10*	*4.618.862.000*	-	*524.280.000*							-	*524.280.000*	-		
		Jumlah dokumen evaluasi kinerja PD Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	*dokumen*	*4*		-								-	-	-		
5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	dokumen	5	2.293.926.000	1	263.525.000							1	263.525.000	25,00	11,49	

Kode Rekening	Uraian Urusan, Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target kinerja dan anggaran Renja Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2025 (%)		Keterangan
						I		II		III		IV						
				Target	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
5.01.03.2.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	Perangkat Daerah	4	241.188.000	1	3.650.000							1	3.650.000	20,00	1,51	
5.01.03.2.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	dokumen	5	1.888.425.000	1	253.455.000							1	253.455.000	25,00	13,42	
5.01.03.2.02.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitorin dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	Perangkat Daerah	4	195.323.000	1	3.650.000							1	3.650.000	20,00	1,87	
		% Penjabaran Konsistensi Program RPJMD dan RKPD kedalam APBD lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan **% PD dengan kinerja baik ingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	**persen**	**100**			**69.155.000**								**69.155.000**	**-**		
5.01.03.2.03	*Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan*	*Jumlah Dokumen Perencanaan PD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan*	*dokumen*	*7*	*3.998.272.560*	*35*	*69.155.000*							*35*	*69.155.000*	-		
		Jumlah dokumen evaluasi kinerja PD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	*dokumen*	*4*		*2*								*2*	-	-		

Kode Rekening	Uraian Urusan, Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target kinerja dan anggaran Renja Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2025 (%)		Keterangan
						I		II		III		IV						
				Target	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
5.01.03.2.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	dokumen	6	1.587.190.560	6	28.240.000							6	28.240.000	150,00	1,78	
5.01.03.2.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	Perangkat Daerah	3	235.058.000	1	5.110.000							1	5.110.000	16,67	2,17	
5.01.03.2.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	dokumen	31	1.940.134.000	29	27.775.000							29	27.775.000	966,67	1,43	
5.01.03.2.03.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	Perangkat Daerah	29	235.890.000	1	8.030.000							1	8.030.000	3,23	3,40	
5,05	***Penelitian dan Pengembangan***													***0***	-	-		

Kode Rekening	Uraian Urusan, Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target kinerja dan anggaran Renja Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2025 (%)		Keterangan
						I		II		III		IV						
				Target	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
5.05.02	**Program Penelitian dan Pengembangan Daerah**	**Persentase implementasi Rencana kelitbangan**	**persen**	**67**	**3.329.931.100**	**-**	**643.606.000**							**-**	**643.606.000**	**-**		
		Persentase PD yang difasilitasi dalam Penerapan Inovasi Daerah	**persen**	**52**		**-**								**-**	**-**	**-**		
5.05.02.2.01	*Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan*	*Tersedianya Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan*	*dokumen*	*3*	*548.987.000*	*2*	*174.644.000*							*2*	*174.644.000*	*4*		
5.05.02.2.01.0001	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	laporan	1	154.399.000	1	-							1	-	33,33	-	
5.05.02.2.01.0005	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	laporan	1	160.894.000	1	160.894.000							1	160.894.000	100,00	100,00	
5.05.02.2.01.0014	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	laporan	1	233.694.000	-	13.750.000							-	13.750.000	-	5,88	
5.05.02.2.02	*Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan*	*Tersedianya dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan*	*dokumen*	*2*	*786.763.000*	*2*	*326.702.000*							*2*	*326.702.000*	*200*		

Kode Rekening	Uraian Urusan, Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target kinerja dan anggaran Renja Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2025 (%)		Keterangan
						I		II		III		IV						
				Target	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
5.05.02.2.02.0003	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	dokumen	1	268.648.000	1	159.606.000							1	159.606.000	50,00	59,41	
5.05.02.2.02.0010	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	dokumen	1	518.115.000	1	167.096.000							1	167.096.000	100,00	32,25	
5.05.02.2.03	*Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan*	*Tersedianya dokumen Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan*	*dokumen*	*6*	*836.477.700*	*0*	*142.260.000*							*0*	*142.260.000*	-		
5.05.02.2.03.0001	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	dokumen	1	144.620.000	-	142.260.000							-	142.260.000	-	98,37	
5.05.02.2.03.0003	Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	dokumen	1	167.203.600	-	-							-	-	-	-	
5.05.02.2.03.0004	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	dokumen	1	137.075.800	-	-							-	-	-	-	
5.05.02.2.03.0006	Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	dokumen	1	157.221.300	-	-							-	-	-	-	
5.05.02.2.03.0008	Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	dokumen	1	118.180.000	-	-							-	-	-	-	
5.05.02.2.03.0011	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	dokumen	1	112.177.000	-	-							-	-	-	-	

Kode Rekening	Uraian Urusan, Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target kinerja dan anggaran Renja Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2025 (%)		Keterangan
						I		II		III		IV						
				Target	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Kawasan Permukiman																	
5.05.02.2.04	*Pengembangan Inovasi dan Teknologi*	*Tersedianya dokumen Pengembangan Inovasi dan Teknologi*	*dokumen*	*3*	*1.157.703.400*	-	-							-	-	-		
5.05.02.2.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang eknologi dan Inovasi	dokumen	1	929.400.800	-	-							-	-	-	-	
5.05.02.2.04.0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	laporan	1	139.998.600	-	-							-	-	-	-	
5.05.02.2.04.0005	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	laporan	1	88.304.000	-	-							-	-	-	-	
			Jumlah	43.143.127.351		7.491.675.965												

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Dalam penyusunan Renja Perubahan, terdapat penambahan belanja untuk beberapa kegiatan yang sebelumnya belum terakomodir dalam perencanaan awal, sehingga pagu berubah menjadi Rp47.596.586.153 atau meningkat sebesar Rp4.453.458.802. Penyesuaian ini tetap mencerminkan upaya efisiensi sesuai arahan pemerintah. Berikut adalah uraian program, kegiatan, dan sub kegiatan yang mengalami perubahan alokasi anggaran:

1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

   Anggaran program ini adalah sebesar Rp.5.661.006.020 pada perubahan renja menjadi Rp. 5.830.583.019 atau penambahan anggaran sebesar Rp.169.576.999 dengan rincian kegiatan seperti berikut :

   a. Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota memiliki anggaran sebesar Rp. 3.358.481.000 pada renja perubahan mengalami pengurangan anggaran menjadi Rp. Rp3.358.143.000.
      Alasan perubahan : penyesuaian pada spesifikasi rincian belanja
      Output : *Dokumen RKPD 2026-2027, RPJMD 2025-2029, RENSTRA 2025-2029, RKPD-P 2025, RENJA 2026-2029*
   b. Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah tidak mengalami perubahan.
   c. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Pengendalian dengan sub kegiatan Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah pada pagu anggaran awal Rp1.414.215.000 menjadi Rp1.584.130.000.
      Alasan perubahan : Mengalami penambahan sebesar Rp169.915.000 dialokasikan untuk Belanja Jasa Tenaga Ahli Penyusunan Evaluasi RKPD Tahun 2025 melalui kerja sama dengan perguruan tinggi, sehingga pagu total menjadi Rp1.584.130.000.
      Output : *Laporan Evaluasi RKPD Tahun 2025.*

2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

   a. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, dengan anggaran sebesar Rp.2.999.160.650 pada renja perubahan menambah anggaran menjadi Rp. 3.269.660.650.

      Perubahan anggaran terjadi pada 3 sub kegiatan, yaitu :

      1) Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dengan anggaran sebesar Rp749.431.200 pada Renja Perubahan menjadi Rp960.931.200
         Alasan perubahan: Penambahan belanja untuk tenaga ahli dalam kegiatan Smart City yang semula sebesar Rp144.000.000 disesuaikan menjadi Rp355.500.000. Penyusunan Masterplan Smart City diperlukan karena masterplan sebelumnya untuk periode 2024–2026 belum selaras dengan RPJMD 2025–2029, sehingga perlu disusun masterplan yang baru dan sejalan dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan dalam RPJMD 2025–2029.
         Output: Laporan Pendampingan Implementasi Masterplan Smart City

2)Sub Kegiatan Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan tidak mengalami perubahan.

3)Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia tidak mengalami perubahan.

4)Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia dengan anggaran sebesar Rp311.447.000 pada Renja Perubahan menjadi Rp370.447.000
Alasan perubahan: Penambahan alokasi untuk belanja tenaga ahli sebesar Rp59.000.000 untuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi (Monev) terhadap Rencana Aksi Daerah (RAD) HIV. Kegiatan Monev terhadap RAD HIV belum pernah dilakukan sebelumnya dan belum terakomodir dalam anggaran murni, sehingga diperlukan alokasi tambahan guna mendukung pelaksanaannya secara optimal.
Output: Laporan Monev RAD HIV

b. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam), dengan 4 sub kegiatan mendapat anggaran sebesar Rp.4.618.862.000 dan pada renja perubahan menjadi Rp. 5.276.110.000

1) Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dengan anggaran sebesar Rp.2.293.926.000 pada renja perubahan menjadi Rp.2.672.294.800;
Alasan Perubahan : Terdapat penambahan anggaran sebagai akibat dari perubahan target dalam sub kegiatan ini. Untuk mendukung fasilitasi dan promosi produk unggulan, diperlukan tambahan belanja tenaga ahli serta belanja pendukung lainnya.
Output : *Laporan Fasilitasi dan Promosi Produk Unggulan Kab. Tangerang, Dokumen Sinkronisasi Pembangunan Ekonomi Tematik Potensi Lokal, Dokumen Penyusunan Rancangan Konsep Penataan Perekonomian Wilayah*

2) Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dengan anggaran sebesar Rp.241.188.000 pada renja perubahan dirasionalisasi menjadi Rp.193.188.000;
Alasan Perubahan : Terdapat perubahan belanja pada komponen dokumentasi kegiatan dan sewa kendaraan sebagai bagian dari upaya refocusing dan efisiensi belanja pada program-program prioritas.
Output : *Laporan Monev Perencanaan Bidang Perkonomian dan SDA (Sumber Daya Alam).*

3) Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dengan anggaran sebesar Rp.1.888.425.000 pada renja perubahan menjadi Rp.2.215.304.200;

Alasan Perubahan : Terdapat penambahan belanja untuk kegiatan Hari Mangrove dilakukan sebagai bagian dari upaya mendukung pencapaian Program Asta Cita ke-6.
Output : *Dokumen Perencanaan Pengembangan Parakan serta Perlindungan Biodiversity Tanaman Endemik, Perencanaan strategi Pengurangan Pemborosan Pangan serta Pemanfaatannya, Penyusunan RADPG (Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi), Penyusunan Roadmap dan Strategi Peningkatan Ketahanan Pangan dan Cadangan Pangan, Pengembangan Destinasi Wisata Berbasis SDA, Pengembangan Ekonomi di Pesisir (Ekonomi Biru).*

4) Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA tidak mengalami perubahan.

c. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, dengan anggaran sebesar Rp. 3,998,272,560 pada renja perubahan menjadi Rp. 5,168,182,000 untuk membiayai 4 sub kegiatan:

1) Sub Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dengan anggaran sebesar Rp1.587.190.560 pada Renja Perubahan menjadi Rp2.699.374.000
Alasan perubahan: Penambahan beberapa kegiatan yang mendukung koordinasi perencanaan di bidang infrastruktur dan kewilayahan.
Output: Penyusunan Dokumen Rencana Umum Jaringan Jalan Kabupaten Tangerang, Penyusunan DED Pembangunan Pusat Inovasi Pemuda, Pusat Trauma Healing dan Training Center, Boarding School KORPRI, Renovasi Islamic Center

2) Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dengan anggaran sebesar Rp235.058.000 pada Renja Perubahan menjadi Rp248.498.000
Alasan perubahan: Penyesuaian beberapa item belanja untuk mendukung pelaksanaan monitoring dan evaluasi.
Output: Laporan Monev Program Open Defecation Free (ODF), dan Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

3) Sub Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) dengan anggaran sebesar Rp1.940.134.000 pada Renja Perubahan menjadiRp1.972.900.000. *Alasan perubahan:* Perubahan beberapa item belanja untuk mendukung kelengkapan pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan.
Output: Laporan Kajian Perlindungan Kawasan Pesisir Kabupaten Tangerang, Penataan Kawasan Kumuh Cituis, Pengembagan Data Bidang Kewilayahan, Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Hutan Mangrove, Penyusunan Kebijakan Kewilayahan, Masterplan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Utara Kabupaten Tangerang.

4) Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan dengan anggaran sebesar Rp235.890.000 pada Renja *Perubahan menjadi* Rp247.410.000

Alasan perubahan: Perubahan item belanja untuk menyesuaikan kebutuhan pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang kewilayahan.
Output: Laporan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, dan Monev Program Sekolah Keaneka Ragaman Hayati.

3. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
Anggaran program ini adalah sebesar Rp.3.329.931.100 pada perubahan renja menjadi Rp.3.699.888.100. Terdiri dari 4 kegiatan, 3 kegiatan mendapat penambahan anggaran :
   a. Kegiatan Penelitian Dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pengkajian Peraturan :
      (1) Sub Kegiatan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan
      Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah mempunyai pagu sebesar Rp 154,399,000 dan tidak mengalami perubahan pagu.
      (2) Sub Kegiatan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi mengalami perubahan pagu dari Rp160,894,000 menjadi sebesar Rp310,271,000.
      Alasan perubahan: Penambahan dilakukan sehubungan dengan adanya kebutuhan Belanja Jasa Tenaga Ahli untuk mendukung penyusunan dokumen kajian Proses Pengolahan Ikan.
      Output : Dokumen Kajian Perencanaan Pusat Pengelolaan Hasil Produksi Perikanan (Kajian dan DED).
      (3) Sub Kegiatan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan mempunyai pagu sebesar Rp 154,399,00 dan tidak mengalami perubahan pagu Rp 233,694,000 dan tidak mengalami perubahan pagu.
   b. Kegiatan Penelitian Dan Pengembangan Bidang Sosial Dan Kependudukan :
      (1) Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan tidak mengalami perubahan pagu.
      (2) Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat dengan anggaran sebesar Rp518.115.000 pada Renja Perubahan menjadi Rp638.695.000.
      Alasan perubahan: Penambahan Belanja Jasa Tenaga Ahli
      Output: Dokumen Hasil Kajian Indeks Harmoni Indonesia Kabupaten Tangerang.
   c. Kegiatan Penelitian Dan Pengembangan Bidang Ekonomi Dan Pembangunan :
      (1) Sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tidak mengalami perubahan pagu.
      (2) Sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah tidak mengalami perubahan pagu.
      (3) Sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan tidak mengalami perubahan pagu.
      (4) Sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral tidak mengalami perubahan pagu.
      (5) Sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan tidak mengalami perubahan pagu.

(6) Sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman belum mengalami perubahan pagu, dari semula sebesar Rp112.117.000.
Namum dalam wacana untuk melakukan penambahan kegiatan jika memungkin dilakukan untuk mendukung kebutuhan penyusunan studi penataan dan permukiman produktif berkelanjutan.

d. Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi tidak memiliki pagu sebesar Rp,1,157,703,400 yang tidak mengalami perubahan. Pagu tersebut untuk membiayai 3 Sub Kegiatan yaitu :
(1) Sub Kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi.
(2) Sub Kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan
(3) Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual

4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Anggaran program ini adalah sebesar Rp.22.535.895.021 pada perubahan renja menjadi Rp.24.201.187.207 untuk membiayai 7 kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah, terdapat beberapa kegiatan yang terdapat penyesuaian, sebagai berikut :
a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tidak mengalami perubahan.
b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
(1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN mengalami perubahan anggaran, dari semula sebesar Rp14.365.867.543 pada Renja Perubahan menjadi 16.002.135.169.
Alasan perubahan: Penambahan anggaran dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pembayaran gaji bagi 15 CPNS dan 13 PPPK, serta menyesuaikan dengan hasil Berita Acara Rekonsiliasi Gaji tertanggal 7 Mei 2025.
Output: Berita Acara Rekonsiliasi Gaji.
(2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun tidak mengalami perubahan anggaran.
(3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD tidak mengalami perubahan anggaran.
c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian
(1) Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya dengan anggaran sebesar Rp303.424.600 pada Renja Perubahan menjadi Rp232.377.600 2
Alasan perubahan: Penyesuaian ini dilakukan sehubungan dengan adanya perubahan standar harga satuan barang/jasa pemerintah.
(2) Sub Kegiatatan Pengadaan Pelatihan Pegawai dan Berdasarkan Tugas dan Fungsi tidak mengalami perubahan anggaran.
d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp3.133.091.100 pada Renja Perubahan menjadi Rp2.960.711.100 dengan rincian perubahan pada sub kegiatan sebagai berikut :

(1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor tidak mengalami perubahan anggaran.
(2) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor mengalami perubahan anggaran sebelumnya 1,218,001,000 menjadi 984,807,000.
Alasan Perubahan : Sebagai tindak lanjut arahan Presiden terkait refocusing belanja dan efisiensi anggaran.
(3) Sub kegiatan Peralatan Rumah Tangga tidak mengalami perubahan anggaran.
(3) Sub kegiatan Pengadaan Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan, yang mengalami perubahan rincian belanja, dengan penyesuaian nilai anggaran dari sebelumnya sebesar Rp419.013.000 menjadi Rp420.747.000.
Alasan perubahan: Dilakukan penyesuaian pada komponen belanja untuk mengakomodasi kebutuhan yang lebih prioritas, meskipun perubahan hanya terjadi pada rincian, bukan substansi kegiatan.
(4) Sub kegiatan pengadaan barang cetakan dan pengadaan tidak mengalami perubahan rincian anggaran.
(5) Sub kegiatan Pengadaan Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan, mengalami perubahan pagu dari 259,700,000 menjadi 318,780,00.
Alasan Perubahan : sub kegiatan ini mengalami penambahan anggaran karena adanya tambahan untuk pengadaan jasa iklan.
(6) Sub Kegiatan pengadaan kasilitasi kunjungan tamu tidak mengalami perubahan anggaran.
(7) Sub Kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD tidak mengalami perubahan anggaran.

e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
(1) Sub Kegiatan Penyediaan Mebel sebesar Rp565.755.200 pada Renja Perubahan menjadi Rp 310.237.600
Alasan perubahan: Terdapat refocusing perubahan dikarenakan arahan efesiensi belanja.

f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
(1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik tidak mengalami perubagan anggaran.
(2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan anggaran sebesar Rp1.795.550.202 pada Renja Perubahan menjadi Rp1.838.164.362.
Alasan perubahan: Penambahan kebutuhan pembayaran gaji ke-13 dan ke-14 bagi staf non-ASN yang belum terakomodir.

g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
(1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan anggaran sebesar Rp525.784.576 pada Renja Perubahan menjadi Rp528.339.576

Alasan perubahan: Tambahan kebutuhan untuk perpanjangan STNK kendaraan serta BBM dan pemeliharaan kendaraan operasional yang belum terakomodir.

(2) *Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya tidak mengalami perubahan anggaran.*

(3) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan anggaran sebesar Rp1.277.250.000 pada Renja Perubahan menjadi Rp1.760.050.000
Alasan perubahan: Penambahan unit pada gedung yang memerlukan rehabilitasi.

Secara rincian program, kegiatan dan sub kegiatan serta rencana pagu indikatif pada Perubahan Rencana Kerja BAPPEDA Kabupaten Tangerang Tahun 2025 seperti pada tabel berikut :

Tabel 3.1
Rincian program, kegiatan dan sub kegiatan serta rencana pagu indikatif
Perubahan Renja BAPPEDA Kabupaten Tangerang Tahun 2025

Kode Rekening	Uraian Urusan, Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Pagu Murni		Pagu Pergeseran		Pagu Sesudah Perubahan		Selisih	Lokasi
				Target	Anggarannya	Target	Anggarannya	Target	Anggarannya		
1	2	3	4	5		6		7		8=(7-6)	9
5.01.5.05.0.00.01.0000	***Badan Perencanaan Pembangunan Daerah***				***46.902.646.111***		***43.143.127.351***		***47.345.610.976***	***4.202.483.625***	***Kab. Tangerang***
5,01	***Perencanaan***										
5.01.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase pemenuhan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**			**23.549.313.821**	**100**	**22.535.895.021**	**100**	**24.201.187.207**	**1.665.292.186**	**Kab. Tangerang**
5.01.01.2.01	*Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*dokumen*	*22*	*248.395.600*	*22*	*188.988.600*	*22*	*188.988.600*	-	*Kab. Tangerang*
5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	10	62.414.600	10	46.676.600	10	46.676.600	-	Kab. Tangerang
5.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan	5	31.683.000	5	23.212.000	5	23.212.000	-	Kab. Tangerang
5.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan	7	154.298.000	8	119.100.000	8	119.100.000	-	Kab. Tangerang
5.01.01.2.02	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*Jumlah Dokumen Adminstrasi Keuangan*	*dokumen*	*3*	*14.475.704.543*	*3*	*14.448.987.543*	*3*	*16.085.255.169*	*1.636.267.626*	*Kab. Tangerang*
5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	75	14.365.867.543	75	14.365.867.543	75	16.002.135.169	1.636.267.626	Kab. Tangerang

Kode Rekening	Uraian Urusan, Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Pagu Murni		Pagu Pergeseran		Pagu Sesudah Perubahan		Selisih	Lokasi
				Target	Anggarannya	Target	Anggarannya	Target	Anggarannya		
5.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	laporan	1	26.702.000	1	19.124.000	1	19.124.000	-	Kab. Tangerang
5.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	laporan	6	83.135.000	6	63.996.000	6	63.996.000	-	Kab. Tangerang
5.01.01.2.05	*Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	*Jumlah Dokumen Pembinaan Pegawai*	*dokumen*	*2*	*615.280.600*	*2*	*555.987.800*	*2*	*484.940.800*	*(71.047.000)*	*Kab. Tangerang*
5.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	paket	2	303.424.600	4	303.424.600	5	232.377.600	(71.047.000)	Kab. Tangerang
5.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang	47	311.856.000	47	252.563.200	78	252.563.200	-	Kab. Tangerang
5.01.01.2.06	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*dokumen*	*8*	*3.965.493.100*	*8*	*3.133.091.100*	*8*	*2.960.711.100*	*(172.380.000)*	*Kab. Tangerang*
5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	8	69.240.000	8	69.240.000	8	69.240.000	-	Kab. Tangerang
5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	4	1.218.001.000	5	1.218.001.000	7	984.807.000	(233.194.000)	Kab. Tangerang

Kode Rekening	Uraian Urusan, Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Pagu Murni		Pagu Pergeseran		Pagu Sesudah Perubahan		Selisih	Lokasi
				Target	Anggarannya	Target	Anggarannya	Target	Anggarannya		
5.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	21	83.576.700	22	83.576.700	19	83.576.700	-	Kab. Tangerang
5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	15	419.013.000	17	419.013.000	20	420.747.000	1.734.000	Kab. Tangerang
5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket	7	179.312.000	7	145.652.000	8	145.652.000	-	Kab. Tangerang
5.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dokumen	4	259.700.000	4	259.700.000	8	318.780.000	59.080.000	Kab. Tangerang
5.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	laporan	93	199.526.400	94	164.876.400	90	164.876.400	-	Kab. Tangerang
5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	110	1.537.124.000	120	773.032.000	80	773.032.000	-	Kab. Tangerang
5.01.01.2.07	*Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	*Jumlah dokumen Barang Milik Daerah*	*dokumen*	*1*	*565.755.200*	*1*	*565.755.200*	*1*	*310.237.600*	*(255.517.600)*	*Kab. Tangerang*
5.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	paket	1	565.755.200	2	565.755.200	3	310.237.600	(255.517.600)	Kab. Tangerang
5.01.01.2.08	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Jumlah Dokumen Jasa Penunjang Urusan Pemda*	*dokumen*	*2*	*1.831.150.202*	*2*	*1.795.550.202*	*2*	*1.838.164.362*	*42.614.160*	*Kab. Tangerang*
5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	bulan	12	314.926.634	12	314.926.634	12	327.340.794	12.414.160	Kab. Tangerang
5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor yang Disediakan	bulan	12	1.516.223.568	12	1.480.623.568	12	1.510.823.568	30.200.000	Kab. Tangerang

Kode Rekening	Uraian Urusan, Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Pagu Murni		Pagu Pergeseran		Pagu Sesudah Perubahan		Selisih	Lokasi
				Target	Anggarannya	Target	Anggarannya	Target	Anggarannya		
5.01.01.2.09	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Jumlah Dokumen Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*dokumen*	*3*	*1.847.534.576*	*3*	*1.847.534.576*	*3*	*2.332.889.576*	*485.355.000*	*Kab. Tangerang*
5.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	26	525.784.576	26	525.784.576	32	528.339.576	2.555.000	Kab. Tangerang
5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	75	44.500.000	75	44.500.000	43	44.500.000	-	Kab. Tangerang
5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	1	1.277.250.000	1	1.277.250.000	1	1.760.050.000	482.800.000	Kab. Tangerang
5.01.02	**Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah**				**6.883.507.530**		**5.661.006.020**		**5.830.583.019**	**169.576.999**	**Kab. Tangerang**
		Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Tepat Waktu	**persen**	**100**	**4.019.388.200**	**100**	**3.358.481.000**	**100**	**3.358.143.000**	**(338.000)**	**Kab. Tangerang**
5.01.02.2.01	*Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan*	*Ditetapkannya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota*	*dokumen*	*10*	*4.019.388.200*	*10*	*3.358.481.000*	*10*	*3.358.143.000*	*(338.000)*	*Kab. Tangerang*
5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	dokumen	10	4.019.388.200	10	3.358.481.000	10	3.358.143.000	(338.000)	Kab. Tangerang
		Prosentase Ketersedian Data Pembangunan	**persen**	**66**	**941.186.230**	**66**	**888.310.020**	**66**	**888.310.019**	**(1)**	**Kab. Tangerang**

Kode Rekening	Uraian Urusan, Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Pagu Murni		Pagu Pergeseran		Pagu Sesudah Perubahan		Selisih	Lokasi
				Target	Anggarannya	Target	Anggarannya	Target	Anggarannya		
5.01.02.2.02	*Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah*	*Jumlah Dokumen Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan*	*dokumen*	*5*	*941.186.230*	*5*	*888.310.020*	*5*	*888.310.019*	*(1)*	*Kab. Tangerang*
5.01.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	dokumen	5	941.186.230	5	888.310.020	5	888.310.019	(1)	Kab. Tangerang
		Persentase Dokumen Pelaporan dan Pengendalian Perencanaan Pembangunan	**persen**	**100**	**1.922.933.100**	**100**	**1.414.215.000**	**100**	**1.584.130.000**	**169.915.000**	**Kab. Tangerang**
5.01.02.2.03	*Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah*	*Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah*	*10 laporan*	*10*	*1.922.933.100*	*10*	*1.414.215.000*	*12*	*1.584.130.000*	*169.915.000*	*Kab. Tangerang*
5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	*10 laporan*	*10*	*1.922.933.100*	*10*	1.414.215.000	*12*	1.584.130.000	169.915.000	Kab. Tangerang
5.01.03	**Program Koordinasi dan Sinkronisasi Pembangunan Daerah**				**12.822.943.960**		**11.616.295.210**		**13.713.952.650**	**2.097.657.440**	**Kab. Tangerang**
		% Penjabaran Konsistensi Program RPJMD dan RKPD kedalam APBD lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	**persen**	**100**		**100**		**100**		**-**	**Kab. Tangerang**
		% PD dengan kinerja baik lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	**persen**	**100**		**100**		**100**		**-**	**Kab. Tangerang**

Kode Rekening	Uraian Urusan, Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Pagu Murni		Pagu Pergeseran		Pagu Sesudah Perubahan		Selisih	Lokasi
				Target	Anggarannya	Target	Anggarannya	Target	Anggarannya		
5.01.03.2.01	*Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia*	*Jumlah Dokumen Perencanaan PD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia*	*dokumen*	*16*	*3.520.271.650*	*16*	*2.999.160.650*	*16*	*3.269.660.650*	*270.500.000*	*Kab. Tangerang*
		Jumlah dokumen evaluasi kinerja PD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	*dokumen*	*5*		*4*		*4*		-	*Kab. Tangerang*
5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	dokumen	8	856.591.200	4	749.431.200	4	960.931.200	211.500.000	Kab. Tangerang
5.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	laporan	5	386.247.000	4	281.029.000	4	281.029.000	-	Kab. Tangerang
5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	dokumen	8	1.855.751.450	2	1.657.253.450	2	1.657.253.450	-	Kab. Tangerang
5.01.03.2.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	laporan	5	421.682.000	7	311.447.000	7	370.447.000	59.000.000	Kab. Tangerang

Kode Rekening	Uraian Urusan, Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Pagu Murni		Pagu Pergeseran		Pagu Sesudah Perubahan		Selisih	Lokasi
				Target	Anggarannya	Target	Anggarannya	Target	Anggarannya		
		% Penjabaran Konsistensi Program RPJMD dan RKPD kedalam APBD lingkup Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	**persen**	**100**		**100**		**100**		**-**	**Kab. Tangerang**
		% PD dengan kinerja baik lingkup Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	**persen**	**100**		**100**		**100**		**-**	**Kab. Tangerang**
5.01.03.2.02	*Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)*	*Jumlah Dokumen Perencanaan PD Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)*	*dokumen*	*10*	*5.078.455.750*	*10*	*4.618.862.000*	*10*	*5.276.110.000*	*657.248.000*	*Kab. Tangerang*
		Jumlah dokumen evaluasi kinerja PD Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	*dokumen*	*4*		*4*		*4*		-	*Kab. Tangerang*
5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	dokumen	5	2.528.577.350	5	2.293.926.000	5	2.672.294.800	378.368.800	Kab. Tangerang
5.01.03.2.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	laporan	4	241.646.000	4	241.188.000	4	193.188.000	(48.000.000)	Kab. Tangerang
5.01.03.2.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	dokumen	5	2.062.444.000	5	1.888.425.000	5	2.215.304.200	326.879.200	Kab. Tangerang

Kode Rekening	Uraian Urusan, Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Pagu Murni		Pagu Pergeseran		Pagu Sesudah Perubahan		Selisih	Lokasi
				Target	Anggarannya	Target	Anggarannya	Target	Anggarannya		
5.01.03.2.02.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	laporan	4	245.788.400	4	195.323.000	4	195.323.000	-	Kab. Tangerang
		% Penjabaran Konsistensi Program RPJMD dan RKPD kedalam APBD lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	**persen**	**100**		**100**		**100**		**-**	**Kab. Tangerang**
		% PD dengan kinerja baik ingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	**persen**	**100**		**100**		**100**		**-**	**Kab. Tangerang**
5.01.03.2.03	*Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan*	*Jumlah Dokumen Perencanaan PD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan*	*dokumen*	*84*	*4.224.216.560*	*84*	*3.998.272.560*	*89*	*5.168.182.000*	*1.169.909.440*	*Kab. Tangerang*
		Jumlah dokumen evaluasi kinerja PD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	*dokumen*	*8*		*8*		*8*		-	*Kab. Tangerang*
5.01.03.2.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	dokumen	18	1.679.515.560	18	1.587.190.560	23	2.699.374.000	1.112.183.440	Kab. Tangerang
5.01.03.2.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	laporan	4	260.060.000	4	235.058.000	4	248.498.000	13.440.000	Kab. Tangerang

Kode Rekening	Uraian Urusan, Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Pagu Murni		Pagu Pergeseran		Pagu Sesudah Perubahan		Selisih	Lokasi
				Target	Anggarannya	Target	Anggarannya	Target	Anggarannya		
5.01.03.2.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	dokumen	66	2.016.431.000	66	1.940.134.000	66	1.972.900.000	32.766.000	Kab. Tangerang
5.01.03.2.03.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	laporan	4	268.210.000	4	235.890.000	4	247.410.000	11.520.000	Kab. Tangerang
5,05	***Penelitian dan Pengembangan***									-	***Kab. Tangerang***
5.05.02	**Program Penelitian dan Pengembangan Daerah**	**Persentase implementasi Rencana kelitbangan**	**persen**	**67**	**3.646.880.800**	**67**	**3.329.931.100**	**67**	**3.599.888.100**	**269.957.000**	**Kab. Tangerang**
		Persentase PD yang difasilitasi dalam Penerapan Inovasi Daerah	**persen**	**52**		**52**		**52**		**-**	**Kab. Tangerang**
5.05.02.2.01	*Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan*	*Tersedianya Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan*	*dokumen*	3	*569.727.000*	*3*	*548.987.000*	*3*	*698.364.000*	*149.377.000*	*Kab. Tangerang*
5.05.02.2.01.0001	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	laporan	1	154.399.000	1	154.399.000	1	154.399.000	-	Kab. Tangerang
5.05.02.2.01.0005	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	laporan	1	160.894.000	1	160.894.000	1	310.271.000	149.377.000	Kab. Tangerang

Kode Rekening	Uraian Urusan, Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Pagu Murni		Pagu Pergeseran		Pagu Sesudah Perubahan		Selisih	Lokasi
				Target	Anggarannya	Target	Anggarannya	Target	Anggarannya		
5.05.02.2.01.0014	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	laporan	1	254.434.000	1	233.694.000	1	233.694.000	-	Kab. Tangerang
5.05.02.2.02	*Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan*	*Tersedianya dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan*	*dokumen*	*2*	*786.763.000*	*2*	*786.763.000*	*2*	*907.343.000*	*120.580.000*	*Kab. Tangerang*
5.05.02.2.02.0003	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	dokumen	1	268.648.000	1	268.648.000	1	268.648.000	-	Kab. Tangerang
5.05.02.2.02.0010	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	dokumen	1	518.115.000	1	518.115.000	1	638.695.000	120.580.000	Kab. Tangerang
5.05.02.2.03	*Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan*	*Tersedianya dokumen Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan*	*dokumen*	*6*	*898.747.000*	*6*	*836.477.700*	*6*	*836.477.700*	-	*Kab. Tangerang*
5.05.02.2.03.0001	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	dokumen	1	144.620.000	1	144.620.000	1	144.620.000	-	Kab. Tangerang
5.05.02.2.03.0003	Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	dokumen	1	184.023.000	1	167.203.600	1	167.203.600	-	Kab. Tangerang
5.05.02.2.03.0004	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	dokumen	1	153.869.000	1	137.075.800	1	137.075.800	-	Kab. Tangerang
5.05.02.2.03.0006	Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	dokumen	1	174.293.000	1	157.221.300	1	157.221.300	-	Kab. Tangerang

Kode Rekening	Uraian Urusan, Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Pagu Murni		Pagu Pergeseran		Pagu Sesudah Perubahan		Selisih	Lokasi
				Target	Anggarannya	Target	Anggarannya	Target	Anggarannya		
5.05.02.2.03.0008	Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	dokumen	1	125.239.000	1	118.180.000	1	118.180.000	-	Kab. Tangerang
5.05.02.2.03.0011	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	dokumen	1	116.703.000	1	112.177.000	1	112.177.000	-	Kab. Tangerang
5.05.02.2.04	*Pengembangan Inovasi dan Teknologi*	*Tersedianya dokumen Pengembangan Inovasi dan Teknologi*	*dokumen*	1	*1.391.643.800*	*3*	*1.157.703.400*	*3*	*1.157.703.400*	-	*Kab. Tangerang*
5.05.02.2.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang eknologi dan Inovasi	dokumen	*3*	1.087.276.000	1	929.400.800	1	929.400.800	-	Kab. Tangerang
5.05.02.2.04.0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	laporan	1	186.984.800	1	139.998.600	1	139.998.600	-	Kab. Tangerang
5.05.02.2.04.0005	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	laporan	1	117.383.000	1	88.304.000	1	88.304.000	-	Kab. Tangerang
Jumlah					**46.902.646.111**		**43.143.127.351**	1	**47.345.610.976**	**4.202.483.625**	

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) BAPPEDA Kabupaten Tangerang Tahun 2025 disusun sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2025, dengan mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran Perubahan (KUA-P) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun 2025, setelah ditetapkannya Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 melalui Peraturan Bupati Tangerang.

Dokumen Perubahan Renja ini disusun untuk memastikan pelaksanaan program dan kegiatan BAPPEDA tetap berjalan efektif, terarah, dan adaptif terhadap dinamika kebutuhan pembangunan daerah. Untuk itu, kepada Sekretariat Badan dan seluruh Bidang diharapkan:

1. Melaksanakan Perubahan Renja Tahun 2025 secara optimal, sesuai dengan tugas pokok, fungsi, dan kewenangan masing-masing.
2. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan Perubahan Renja BAPPEDA Kabupaten Tangerang, guna memastikan ketercapaian target kinerja pelaksanaan pada Tahun 2025.

8. Dinas Pendidikan

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka menciptakan bangsa yang cerdas, Pemerintah Pusat dan Daerah perlu menyusun perencanaan pembangunan pendidikan yang lengkap dan padu yang dituangkan dalam rencana pembangunan bidang pendidikan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan. Perencanaan pembangunan bidang pendidikan mencakup peningkatan kelembagaan dan pelayanan pendidikan. Dalam bidang kelembagaan, perencanaan diarahkan untuk memperkuat sistem desentralisasi pendidikan sedangkan dalam pelayanan pendidikan diprioritaskan pada pemerataan pendidikan dengan prorgam wajib belajar pendidikan dasar, penuntasan buta aksara, peningkatan angka partisipasi pendidikan menengah, peningkatan relevansi pendidikan dengan kebutuhan masyarakat, dan peningkatan mutu lulusan.

Sesuai dengan sistem perencanaan pembangunan nasional perencanaan pembangunan bidang pendidikan dijabarkan dalam rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, Rencana Kinerja (Renja) Daerah, rencana strategis satuan kerja perangkat daerah bidang pendidikan, dan Rencana Kinerja (Renja) SKPD bidang pendidikan. Dalam kaitan ini, Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang sebagai penanggungjawab dan pelaksana otonomi daerah bidang pendidikan perlu menjabarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tangerang bidang pendidikan 2024-2026 dalam dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang yang diturunkan ke masing-masing Rencana Kinerja (Renja) SKPD.

Rencana Kinerja (Renja SKPD) ini menjadi pedoman bagi semua tingkatan penyelenggara dan pengelola pendidikan: dinas pendidikan kabupaten, dewan pendidikan, unit pelaksana teknis pendidikan kecamatan, penyelenggara pendidikan oleh masyarakat, satuan pendidikan, komite sekolah, dan masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan pendidikan di Kabupaten Tangerang.

Rencana Kinerja (Renja) SKPD ini merupakan penjabaran dari visi dan misi RPJPD Kabupaten Tangerang periode 2005-2025 ke 2025-2045 dan antar RPJMD/RPD periode 2024-2025 ke 2025-2029 yang selanjutnya dikaitkan dengan perencanaan nasional menuju Indonesia Emas 2045.

Visi pembangunan Kabupaten Tangerang yaitu “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tangerang yang Sejahtera dan Berdaya Saing.” Dengan misi pembangunan meliputi :

1. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Tangerang yang mandiri, berdaya saing tinggi dan berakhlak mulia;
2. Mewujudkan perekonomian daerah yang maju dan berdaya saing berbasis pada potensi keunggulan lokal;
3. Mewujudkan pelayanan dasar bagi masyarakat secara merata dan proporsional;
4. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, demokratis dan

partisipatif;

5. Mewujudkan pembangunan yang terpadu dan serasi dengan pendekatan pengembangan wilayah berbasis ekonomi dan ekologi.
6. Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien;
7. Mewujudkan Perekonomian yang Kuat, Produktif, dan Berdaya Saing;
8. Meningkatkan Kesehatan yang Berkualitas;
9. Mewujudkan Pendidikan yang Berkualitas;
10. Mewujudkan Pemerataan dan Percepatan Pembangunan Infrastruktur;
11. Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan.
12. Rencana Kinerja (Renja) SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan Rencana Kinerja (Renja) SKPD dilakukan melalui dua tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, mencakup :
    1) Tahap perumusan rancangan Rencana Kinerja (Renja) Perubahan SKPD.
    2) Tahap penyajian rancangan Rencana Kinerja (Renja) Perubahan SKPD.

Rencana Kinerja (Renja) Perubahan SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2025 memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya. Dalam perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Rencana Kinerja (Renja) Perubahan SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2025, mengacu kepada rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD Pemerintah Kabupaten Tangerang Tahun 2025. Untuk penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas rancangan awal RKPD yang disusun ke dalam rancangan Rencana Kinerja (Renja) Dinas Pendidikan, selaras dengan Renstra Dinas Pendidikan Tahun 2024-2026. Selanjutnya Rencana Kinerja (Renja) Perubahan Dinas Pendidikan Tahun 2025 dijadikan salah satu bahan dalam penyusunan RKPD Perubahan Pemerintah Kabupaten Tangerang Tahun 2025 yang menjadi dasar dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun Anggaran 2025 mendatang.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, beserta Pemutakhirannya melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050- 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
16. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Kepmendagri Nomor 500-5889 Tahun 2021 tentang hasil verifikasi validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan Pembangunan dan keuangan daerah;
18. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 311/M/2022 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan Indeks Pencapaian Standar Pelayana Minimal;
19. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 109);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2020 Nomor 09);
21. Peraturan Gubernur Banten Nomor 33 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahum 2023-2026;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tnagrenag Tahun 2011-2031 (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2020 Nomor 9);
23. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2022 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0222);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0924);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2024

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

26. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang;
27. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 39 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026;
28. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 46 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Tahun 2024-2026;
29. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 37 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
30. Surat Edaran Bupati Nomor B/100.3.4/2808/III/Bappeda/2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah 2025 dan Perubahan Renja Perangkat Daerah 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kinerja (Renja) Perubahan sebagaimana tertuang dalam pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas Pembangunan Daerah, Kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD yang berkenaan;
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
3. Penambahan kegiatan baru akibat terdapat kebijakan nasional atau provinsi, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi setelah RKPD ditetapkan.
4. Perubahan RKPD dapat dilakukan tanpa melalui tahapan evaluasi dalam hal terjadi kebijakan nasional, atau provinsi, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RKPD ditetapkan;
5. Factor lain yang mengakibatkan perlunya dilakukan pergeseran kegiatan antar Perangkat Daerah, perubahan lokasi dan / atau kelompok sasaran, dan penghapusan kegiatan;
6. Untuk ketercapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Bupati serta Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah (PD) (outcame/output) yang ditetapkan, terintegrasi dalam Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025;

7. Untuk ketercapaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah (PD) (outcame/output) yang ditetapkan, terintegrasi dalam Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025;
8. Untuk kelangsungan Pemenuhan pelayanan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Operasional Prosedur (SOP), IKK, SDG's dan prioritas Pembangunan serta untuk mencapai indicator program.

Rencana Kinerja (Renja) Perubahan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Pendidikan dalam rangka pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tangerang bidang pendidikan yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten sebagai penjabaran RPJPN dan RPJMN bidang Pendidikan dan Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Rencana Kinerja (Renja) Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang memuat program dan kegiatan satu tahun ke depan sebagai obyektivasi visi dan misi Kabupaten Tangerang bidang pendidikan yang dituangkan dalam kebijakan, program dan kegiatan.

Berdasarkan hal tersebut maka Rencana Kinerja (Renja) Perubahan Dinas Pendidikan Tahun 2025 ini secara kelembagaan merupakan pedoman utama Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya yaitu sebagai pelaksana kebijakan otonomi daerah bidang pendidikan khususnya untuk Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal. Dengan Rencana Kinerja (Renja) ini maka tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam satu tahun di depan dapat dijabarkan dengan tahapan yang sistematis dan capaian yang terukur.

Berpedoman kepada Surat Edaran B / 100.3.4 / 2808 / III / BAPPEDA / 2025 yang merujuk pada arahan dalam Surat Edaran Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, serta Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, makan Pemerintah Daerah melakukan efisiensi belanja APBD TA 2025 melalui Langkah-langkah sebagai berikut:

1. Membatasi belanja untuk kegiatan yang bersifat ceremonial, kajian, studi banding, percetakan, publikasi, dan seminar/focus group discussion;
2. Mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50% (lima puluh persen) untuk seluruh perangkat daerah;
3. Membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran honorarium dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai standar harga satuan regional;
4. Mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki output yang terukur;
5. Memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan public serta tidak dilakukan berdasarkan alokasi anggaran pada tahun anggaran sebelumnya;

6. Lebih selektif dalam memberikan hibah langsung baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa kepada Kementrian/Lembaga, dan ;
7. Melakukan penyesuaian belanja APBD Tahun Anggaran 2025 yang bersumber dari Transfer Ke Daerah (TKD).
8. Selanjutnya hasil efisiensi dialihkan untuk digunakan :
   a. Bidang Pendidikan;
   b. Bidang Kesehatan;
   c. Infrastruktur dan Sanitasi;
   d. Optimalisasi penanganan dan minuman;
   e. Penyediaan Cadangan Pangan; dan
   f. Prioritas lainnya yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan
   g. Masyarakat, penciptaan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kinerja (Renja) Perubahan Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Tahun 2025 secara garis besar disusun mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 361 ayat 3, bahwa Sistematika Renja Perubahan Perangkat Daerah Dinas Pendidikan yaitu sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang yang terdiri dari : Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA DINAS PENDIDIKAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan Sampai Dengan Triwulan II Tahun Berkenaan dan Capaian Renstra Dinas Pendidikan

BAB III. RENCANA KINERJA DAN PENDANAAN

Berisi indikator dan target kinerja beserta pendanaan program kegiatan dan sub kegiatan

BAB IV. PENUTUP

Berisi catatan penting yang perlu mendapatperhatian kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERJALAN

2.1 Evaluasi Renja Dinas Pendidikan Sampai Dengan Triwulan II Tahun Berkenaan dan Capaian Renstra Dinas Pendidikan

Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun Berkenaan dan Capaian Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang adalah penjabaran dari Rencana Kerja Tahunan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang sebagai Pelaksana Teknis Pembangunan Urusan Wajib Pelayanan Dasar di Dinas Pendidikan.

Adapun evaluasi terhadap Renja Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Triwulan II Tahun berkenaan meliputi kebijakan perencanaan program & kegiatan, dan pelaksanaan rencana program & kegiatan. Berdasarkan program dan kegiatan yang ada di Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang telah melaksanakan sejumlah kegiatan melalui program yang ada dengan dana APBD Tahun 2025 dengan anggaran Rp. 2.177.937.080.969 dengan rekapitulasi Evaluasi Renja Tahun 2025 sampai dengan triwulan ke II tahun berkenaan adalah sebesar Rp. 585.275.559.626 atau sebesar 26.87% dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 2.1

Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran Sampai Dengan Triwulan II Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2025

URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN		LEBIH/ (KURANG)	
		JUMLAH (Rp)	(%)	JUMLAH (Rp)	(%)
BELANJA	2.177.937.080.969	585.275.559.626	26,87	1.592.661.521.343	73,13
BELANJA OPERASI	1.928.815.622.816	585.275.559.626	30,34	1.343.540.063.190	69,66
BELANJA MODAL	249.121.458.153	0	0	249.121.458.153	100

Mengacu terhadap evaluasi Renja Pendidikan sampai dengan triwulan II Tahun 2025 yang apabila disandingkan dengan renstra tahun 2025-2029 terhadap target penetapan kinerja dengan Rencana Kerja Perubahan 2025 telah sesuai, namun apabila dibandingkan dengan renstra tahun 2024-2026 tidak terdapat perbedaan program namun terdapat perbedaan target indicator pada masing – masing program kegiatan yang telah dijabarkan dalam dokumen renstra 2025-2029. Pada renstra tahun 2025-2029 program pendukung urusan Pendidikan berjumlah lima program yang dijabarkan pada tabel 2.2 di bawah ini :

Tabel 2.2
Evaluasi Renja Dinas Pendidikan Sampai Dengan Triwulan II Tahun Berkenaan dan
Capaian Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang

No.	PROGRAM	INDIKATOR	2023	2024	Capaian Kinerja S.D 2024	2025		2025	2026
			Realisasi	Realisasi		Target RKPD	Realisasi Tw 2	Target RKPD	Target RKPD
1.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	99,11	99,39	99,39	100,00	99,59	100,00	100,00
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	92,87	95,60	95,60	100,00	97,79	100,00	100,00
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	95,38	92,11	92,11	100,00	72,07	100,00	100,00
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni (APM) Non Formal/ Kesetaraan	70,38	88,32	88,32	100,00	69,79	100,00	100,00

	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Jumlah peserta didik yang dapat Baca Tulis Al Quran Jenjang SD DAN SMP	14.673	0	0				
	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Rata-rata Capaian Outcome Muatan Kurikulum yang Dikembangkan		100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Berkualifikasi minimal D4/S1		90,00	90,00	91,00	0,00	91,00	92,00
	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Rekomendasi Perizinan Pendidikan yang diterbitkan (PAUD/SD/SMP dan Pendidikan Non Formal)		80,00	80,00	85,00	0,00	85,00	90,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Dinas Pendidikan		100,00	100,00	100,00	50,00	100,00	100,00

Tabel 2.3
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM RENSTRA 2024-2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2024	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TW II TAHUN 2025			PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
				TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025	TINGKAT REALISASI (%)	REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2025	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	4	5	6	7	8	9	10
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							
01.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							
01.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**100,00**	**99,93**	**100,00**	**99,59**	**99,59**	**99,59**	**99,59**
		100,00	**95,60**	**100,00**	**72,07**	**72,07**	**72,07**	**72,07**

		100,00	**92,11**	**100,00**	**97,79**	**97,79**	**97,79**	**97,79**
		100,00	**88,32**	**100,00**	**69,79**	**69,79**	**69,79**	**69,79**
1.01.02.2.01	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**	**1.038,00**	**1.026,00**	**1.038,00**	**1.026,00**	**98,84**	**1.026,00**	**98,84**
1.01.02.2.01.01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	6	2	4	1	25,00	3	50,00
1.01.02.2.01.03	Pembangunan Ruang guru/Kepala Sekolah/TU	4	2	0	-	0,00	2	50,00
1.01.02.2.01.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	14	9	0		0,00	9	64,29
1.01.02.2.01.05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	14	2	0	-	0,00	2	14,29
1.01.02.2.01.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	150	85	22	1	4,55	86	57,33
1.01.02.2.01.09	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	5	1	0	-	0,00	1	20,00
1.01.02.2.01.14	Pengadaan Mebel Sekolah	200	120	95	-	0,00	120	60,00
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	4.800	4.800	24.092	-	0,00	4.800	100,00
1.01.02.2.01.22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	84	0	16	-	0,00	-	-
1.01.02.2.01.25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	2175	1450	2175	1	0,05	1450	66,67

1.01.02.2.01.26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	3237	3192	3237	3159	97,59	3192	98,61
1.01.02.2.01.27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1.200	1.200	1.200	600	50,00	1200	100,00
1.01.02.2.01.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	950	400	950	50	5,26	400	42,11
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	1.026	1.026	1.026	1.026	100,00	1026	100,00
1.01.02.2.01.30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	265.278	265.278	265.278	265.278	100,00	265278	100,00
1.01.02.2.01.31	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	47	9	0	-	0,00	9	19,15
1.01.02.2.01.35	Pembinaan Penggunaan Teknologi, informasi dan komunikasi (TIK) untuk pendidikan	260	260	260	260	100,00	260	100,00
1.01.02.2.01.36	Pengembangan Konten Digital untuk Pendidikan	1	1	1	1	100,00	1	100,00
1.01.02.2.01.37	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	220	220	220	220	100,00	220	100,00

1.01.02.2.01.38	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	2	1	2	-	0,00	1	50,00
1.01.02.2.01.39	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	1	1	1	0	0,00	1	100,00
1.01.02.2.01.41	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	273	212	273	0	0,00	212	77,66
1.01.02.2.01.43	Pemberian Layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan dan intoleransi	58	3	29	0	0,00	3	5,17
1.01.02.2.01.47	Pembangunan Ruang Kelas Baru	270	31	134	1	0,75	32	11,85
1.01.02.2.01.49	Bimbingan Teknis, Pelatihan dan/atau Magang/PKL untuk peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	1200	1200	1200	0	0,00	1200	100,00
1.01.02.2.01.50	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	1013	1013	1013	0	0,00	1013	100,00
1.01.02.2.01.51	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	400	282	228	50	21,93	332	83,00
1.01.02.2.02	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	**463,00**	**438,00**	**463,00**	**438,00**	**94,60**	**438,00**	**94,60**
1.01.02.2.02.01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	12	2	2	0	0,00	2	16,67

1.01.02.2.02.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	11	0	5	1	20,00	1	9,09
1.01.02.2.02.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	10	2	0	0	0,00	2	20,00
1.01.02.2.02.05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	13	0	0	0	0,00	0	-
1.01.02.2.02.06	Pembangunan Laboratorium	26	6	0	0	0,00	6	23,08
1.01.02.2.02.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	57	43	14	1	7,14	44	77,19
1.01.02.2.02.14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	255	94	67	1	1,49	95	37,25
1.01.02.2.02.17	Rehabilitasi Sedang/ Berat Perpustakaan Sekolah	11	3	0	0	1,00	3	27,27
1.01.02.2.02.18	Rehabilitasi Sedang/ Berat Laboratorium	11	2	0	0	1,00	2	18,18
1.01.02.2.02.25	Pengadaan Mebel Sekolah	250	80	85	0	0,00	80	32,00
1.01.02.2.02.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	1.800	1790	25.869	0	0,00	1.790	99,44
1.01.02.2.02.35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	11	4	8	0	0,00	4	36,36
1.01.02.2.02.38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	2.552	2.552	2.552	0	0,00	2.552	100,00

1.01.02.2.02.39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1774	1774	1467	1.225	83,50	1.774	100,00
1.01.02.2.02.40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	985	985	800	400	50,00	985	100,00
1.01.02.2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	400	400	217	0	0,00	400	100,00
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	430	430	430	0	0,00	430	100,00
1.01.02.2.02.43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	69.161	69161	69161	0	0,00	69.161	100,00
1.01.02.2.02.48	pembinaan Penggunaan Teknologi, informasi dan Komunikasi (TIK) untuk pendidikan	23.750	23750	23.000	0	0,00	23.750	100,00
1.01.02.2.02.49	Pengembangan Konten Digital untuk pendidikan	1	1	1	0	0,00	1	100,00
1.01.02.2.02.50	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	500	300	500	0	0,00	300	60,00

1.01.02.2.02.51	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1	1	1	0	0,00	1	100,00
1.01.02.2.02.52	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	11	2	1	0	0,00	2	18,18
1.01.02.2.02.54	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	200	200	11	6	0,00	200	100,00
1.01.02.2.02.55	Pemberian Layanan Pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan dan intoleransi	3	2	1	0	0,00	2	66,67
1.01.02.2.02.58	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	430	200	430	0	0,00	200	46,51
1.01.02.2.02.59	Pembangunan Ruang Kelas Baru	109	30	70	1	1,43	31	28,44
1.01.02.2.02.60	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	300	300	250	0	0,00	300	100,00
1.01.02.2.02.64	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/ Kepala Sekolah/TU	21	21	0	0	#DIV/0!	21	100,00
1.01.02.2.03	**Pengelolaan Pendidikan PAUD**	**1579,00**	**1388,00**	**1360,00**	**1388,00**	**102,06**	**1388,00**	**87,90**
1.01.02.2.03.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	60	12	9	1	11,11	13	21,67

1.01.02.2.03.07	Pengadaan Mebel PAUD	160	20	30	0	0,00	20	12,50
1.01.02.2.03.12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	182	66	26	0	0,00	66	36,26
1.01.02.2.03.13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	1420	200	300	200	66,67	200	14,08
1.01.02.2.03.15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	200	200	1200	200	16,67	200	100,00
1.01.02.2.03.16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	30	30	300	100	33,33	30	100,00
1.01.02.2.03.17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	51	41	4	0	0,00	41	80,39
1.01.02.2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	1420	1300	1400	0	0,00	1.300	91,55
1.01.02.2.03.19	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	900	900	1300	0	0,00	900	100,00
1.01.02.2.03.23	Pengembangan Konten Digital untuk Pendidikan	60	60	20	0	0,00	60	100,00
1.01.02.2.03.24	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	1380	1380	1300	0	0,00	1.380	100,00
1.01.02.2.03.25	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	10	3	3	0	0,00	3	30,00

1.01.02.2.03.26	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	5	5	3	0	0,00	5	100,00
1.01.02.2.03.29	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	150	150	20	0	0,00	150	100,00
1.01.02.2.03.30	Pembangunan Ruang Kelas Baru	45	3	4	1	25,00	4	8,89
1.01.02.2.03.39	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	400	400	200	0	0,00	400	100,00
1.01.02.2.03.41	Pengadaan Perlengapan peserta didik	4500	4000	9250	0	0,00	4.000	88,89
1.01.02.2.04	**Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	**85,00**	**71,00**	**85,00**	**71,00**	**83,53**	**71,00**	**83,53**
1.01.02.2.04.10	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	400	387	400	0	0,00	387	96,75
1.01.02.2.04.11	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan	24	2	4	0	0,00	2	8,33
1.01.02.2.04.14	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan di Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan	14	0	12	5	41,67	5	35,71

1.01.02.2.04.16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	90	75	88	1	1,14	75	83,33
1.01.02.2.04.17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	80	71	75	0	0,00	71	88,75
1.01.02.2.04.27	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	4	1	1	0	0,00	1	25,00
1.01.02.2.04.41	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	4	1	1	0	0,00	1	25,00
1.01.02.2.04.46	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	200	200	165	65	39,39	65	32,50
01:01:03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**	**100**	**100**	**100**	**-**	**0,00**	**100**	**33,33**
01.01.2.03.01	**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar**	**25**	**100**	**25**	**-**	**0,00**	**25**	**33,33**
01.01.2.03.01.02	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	2	1	3	-	0,00	1	50,00
01.01.2.03.01.06	Penyusunan Model-model Pembelajaran Inovatif Pendidikan Dasar	3	1	1	-	0,00	1	33,33

01:01:04	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	**90,00**	**90,00**	**90,00**	**-**	**0,00**	**90**	**33,33**
01.01.2.04.01	**Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan**	**2**	**2**	**2**	**-**	**0,00**	**2**	**33,33**
01.01.2.04.01.01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan	3	1	1	-	0,00	1	33,33
01.01.2.04.01.02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan	3	1	1	0	0,00	1	33,33
01:01:05	**PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN**	**80,00**	**80,00**	**80,00**	**0,00**	**0,00**	**80,00**	**33,33**
01.01.2.05.01	**Penerbitan Ijin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat**	**80**	**80**	**80**	**0**	**0,00**	**80**	**33,33**

01.01.2.05.01.01	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat	3	1	1	1	100,00	1	33,33
01.01.2.05.01.02	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh Masyarakat	3	1	1	0	0,00	1	33,33
01.01.2.05.02	**Penerbitan Ijin PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat**	**75**	**75**	**75**	**-**	**0,00**	**75**	**33,33**
01.01.2.05.02.01	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan oleh masyarakat	3	1	1	0	0,00	1	33,33
01.01.2.05.02.02	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan oleh Masyarakat	3	1	1	0	0,00	1	33,33
01.01.2.05.02.03	Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan oleh Masyarakat	3	1	1	0	0,00	1	33,33
01:01:01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	**80,91**	**79,55**	**80,81**	**-**	**0,00**	**79,55**	**98,32**

	DAERAH KABUPATEN/ KOTA							
01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**9,00**	**9,00**	**9,00**	**4,00**	**44,44**	**4,00**	**44,44**
01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	4	3	1	33,33	5	50,00
01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3	1	1	0	0,00	1	33,33
01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3	2	1	0	0,00	2	66,67
01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3	1	1	0	0,00	1	33,33
01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	3	2	1	0	0,00	2	66,67
01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	1	1	1	100,00	1	33,33
01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	1	1	0	0,00	1	33,33
01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**11,00**	**12,00**	**11,00**	**4,00**	**36,36**	**4,00**	**36,36**
01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9375	9054	9375	8.957	**95,54**	8.957	95,54

01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7	3	2	0	0,00	3	42,86
01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	15	5	5	0	0,00	5	33,33
01.01.2.03	**Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**3,00**	**3,00**	**3,00**	**0,00**	**0,00**	**3,00**	**33,33**
01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	3	1	1	0	0,00	1	33,33
01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	5	2	2	0	0,00	3	60,00
01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**5,00**	**5,00**	**5,00**	**1,00**	**20,00**	**1,00**	**20,00**
01.01.2.05.02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1	1	0	0	0,00	0	-
01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	1	1	0	0,00	0	-

01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	300	50	25	0	0,00	0	-
01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	280	30	280	60	21,43	60	21,43
01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**9,00**	**9,00**	**9,00**	**8,00**	**88,89**	**8,00**	**88,89**
01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1	1	1	0	0,00	0	-
01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6	30	6	0	0,00	0	-
01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1	2	1	0	0,00	0	-
01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1	2	1	0	0,00	0	-
01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1	2	1	0	0,00	0	-
01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12	12	1	0	0,00	0	-
01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	12	12	3	25,00	3	25,00
01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	12	3	25,00	3	25,00

01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**4,00**	**4,00**	**4,00**	**2,00**	**50,00**	**2,00**	**50,00**
01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	1	12	0	0,00	0	-
01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	12	12	0	0,00	0	-
01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	12	12	3	25,00	3	25,00
01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**3,00**	**3,00**	**3,00**	**1,00**	**33,33**	**3,00**	**100,00**
01.01.2.09.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	21	19	21	21	100,00	19	90,48
01.01.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	16	7	7	1	14,29	7	43,75
01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	173	173	105	0	0,00	105	60,69

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan **Dinas Pendidikan**

Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang diresmikan pada Tahun 2000 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1995 tentang Perluasan dan Pengembangan Wilayah di Kabupaten/ Kota dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Otonomi Daerah) yang telah diubah dengan UU Nomor 32 Tahun 2004, Dikukuhkan dengan:

1. Surat Keputusan Bupati Tangerang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 119 Tahun 2006 tentang Perubahan Keputusan Bupati Nomor 34 Tahun 2004.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 09 Tahun 2011 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2008 Nomor 02).
4. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2022 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0222);
5. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 6 Tahun 2023, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 2 Tahun 2022, dalam rangka penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan, Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang membentuk lembaga pelaksana otonomi daerah bidang pendidikan dengan nomenklatur Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang. Sebagaimana Peraturan Bupati Tangerang Nomor 6 Tahun 2023, tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang, susunan organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat
   A. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
   B. Kelompok Jabatan Fungsional
3. Bidang Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini
   A. Seksi Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini
   B. Seksi Pengelolaan Pendidikan Nonformal dan Kesetaraan; dan
   C. Kelompok Jabatan Fungsional
4. Bidang Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
   A. Seksi Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar

B. Seksi Pembangunan, Rehabilitasi, dan Pemeliharaan Sekolah Dasar; dan

C. Kelompok Jabatan Fungsional

5. Bidang Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

A. Seksi Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

B. Seksi Pembangunan, Rehabilitasi, dan Pemeliharaan Sekolah Menengah Pertama; dan Bidang Pendidik Tenaga Kependidikan, Bahasa dan Sastra, Kelembagaan Pendidikan, dan Kurikulum Muatan Lokal

C. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Bahasa, dan Sastra

D. Seksi Kelembagaan Pendidikan dan Kurikulum Muatan Lokal; dan

E. Kelompok Jabatan Fungsional

6. UPTD

Gambar 2.1

Struktur Organisasi Dinas Pendidikan

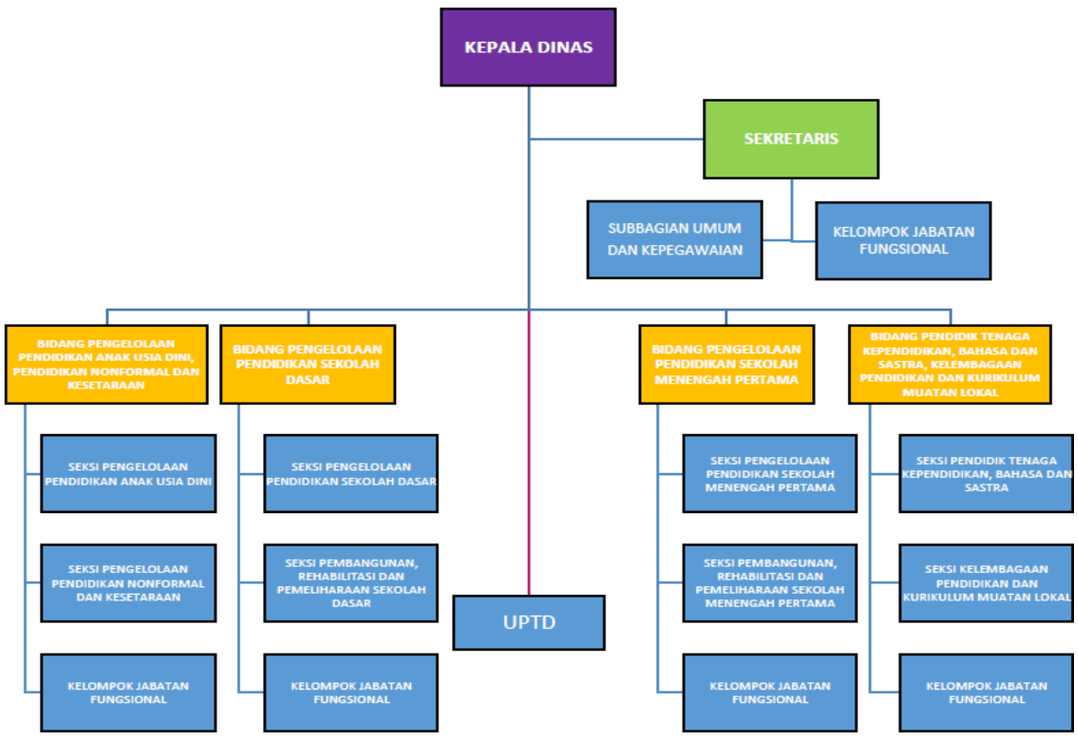

A. Tugas Pokok, Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang

1. Kepala Dinas

1) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah.

2) Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

a. perumusan kebijakan bidang pendidikan;

b. pelaksanaan kebijakan bidang pendidikan;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pendidikan;

d. pelaksanaan administrasi dinas bidang pendidikan; dan

a. merintahan berbasis elektronik;

b. melaksanakan penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi dan zona integritas;

c. melaksanakan administrasi/penatausahan, penggandaan, pengiriman, pendistribusian surat, tata naskah dinas, arsip dinamis disdik, jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, penyedia jasa peralatan dan perlengkapan kantor, serta jasa pelayanan umum kantor;

d. melaksanakan pengadaan penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah, administrasi/penatausahaan barang milik daerah, serta penyusunan laporan barang milik daerah;

e. memfasilitasi peralatan dan perlengkapan kantor, rumah tangga, sarana dan prasarana kantor, perjalanan dinas, serta kendaraan operasional/dinas;

f. memfasilitasi pengadaan mebel, peralatan dan mesin, pengadaan asset tetp lainnya, pengadaan asset tetap tak berwujud, pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya, serta pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya;

g. memfasilitasi penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi disdik serta kunjungan tamu;

h. memfasilitasi pengelolaan informasi dan dokumen;

i. melaksanakan penyusunan bahan untuk peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai;

j. menyusun kebutuhan pakaian dinas berserta atribut kelengkapannya;

k. mempersiapkan koordinasi pelaksanaan analisa jabatan, analisa beban kerja, serta kebutuhan pegawai;

l. menghimpun dan mengolah data administrasi kepegawaian;

m. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan serta mengadakan bimbingan teknis implementasinya;

n. membuat laporan pelaksanaan kegiatan umum dan kepegawaian; dan

o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

2. Kepala Bidang Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Nonformal dan Kesetaraan

Bidang Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Nonformal, dan Kesetaraan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Nonformal, dan Kesetaraan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

1) Bidang Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Nonformal, dan Kesetaraan mempunyai tugas pokok melaksanakan

penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian bidang pengelolaan pendidikan anak usia dini, serta pendidikan nonformal;

2) Dalam melaksanakan tugas Bidang Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Kesetaraan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

a. penyiapan rumusan kebijakan teknis program bidang pengelolaan pendidikan anak usia dini, pendidikan nonformal, dan kesetaraan;

b. penyiapan rencana dan program bidang pengelolaan pendidikan anak usia dini, pendidikan nonformal dan kesetaraan;

c. pengendalian program bidang pengelolaan pendidikan anak usia dini, pendidikan nonformal, dan kesetaraan yang meliputi formasi, rotasi, mutasi, pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan, pengembangan karir pendidik, dan tenaga kependidikan;

d. pembimbingan pegawai dilingkungan bidang pengelolaan pendidikan anak usia dini, pendidikan nonformal, dan kesetaraan untuk meningkatkan kinerja pegawai;

e. pengelolaan administrasi bidang pengelolaan pendidikan anak usia dini, pendidikan nonformal, dan kesetaraan;

f. pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini dan seksi pengelolaan pendidikan nonformal dan kesetaraan;

g. melaksanakan pelaporan hasil program kegiatan bidang pengelolaan pendidikan anak usia dini, pendidikan nonformal, dan kesetaraan;

h. pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

3) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Bidang Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Nonformal, dan Kesetaraan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

a. merencanakan perumusan kebijakan yang berkaitan dengan program bidang pengelolaan pendidikan anak usia dini, pendidikan nonformal, dan kesetaraan;

b. membagi tugas program bidang pengelolaan pendidikan anak usia dini, pendidikan nonformal, dan kesetaraan;

c. memberi petunjuk program pendidikan pengelolaan pendidikan anak usia dini, dan seksi pengelolaan pendidikan nonformal, dan kesetaraan;

d. mengatur program bidang pengelolaan pendidikan anak usia dini dan seksi pengelolaan pendidikan nonformal, dan kesetaraan;

e. mengevaluasi kegiatan program bidang pengelolaan pendidikan anak usia dini, pendidikan nonformal, dan kesetaraan;

f. melaksanakan pembinaan dan pengembangan bidang pengelolaan pendidikan anak usia dini, pendidikan nonformal, dan kesetaraan;

g. melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini, pendidikan nonformal, dan kesetaraan;

h. menyusun standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur bidang pengelolaan pendidikan anak usia dini, pendidikan nonformal, dan kesetaraan;

i. mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan pendidikan anak usia dini, pendidikan nonformal, dan kesetaraan;

j. melaksanakan pemberdayaan peran serta masyarakat di bidang pengelolaan pendidikan anak usia dini, pendidikan nonformal, dan kesetaraan;

k. melaporkan kegiatan pengelolaan dan penyelenggaraan pengelolaan pendidikan anak usia dini, pendidikan nonformal, dan kesetaraan;

l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

3. Bidang Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar

Bidang Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

1) Bidang pengelolaan pendidikan sekolah dasar mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian bidang pengelolaan pendidikan sekolah dasar.

2) Dalam melaksanakan tugas bidang pengelolaan sekolah dasar menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

a. penyiapan rumusan kebijakan teknis bidang pengelolaaan pendidikan sekolah dasar;

b. penyiapan rencana dan program bidang pengelolaan pendidikan sekolah dasar;

c. penyiapan pengendalian di bidang pengelolaan pendidikan sekolah dasar;

d. penyiapan bimbingan di bidang pengelolaan pendidikan sekolah dasar;

e. pengelolaan administrasi di bidang pengelolaan pendidikan sekolah dasar;

f. penyusunan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan pendidikan sekolah dasar;

g. pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan pendidikan sekolah dasar;

h. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan pendidikan sekolah dasar;

i. pelaporan di bidang pengelolaan pendidikan sekolah dasar;

j. pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

3) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Bidang Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

a. Merencanakan perumusan kebijakan program bidang pengelolaan pendididkan sekolah dasar;

b. membagi tugas program bidang pengelolaan pendidikan sekolah dasar;

c. memberi petunjuk program bidang pengelolaan pendidikan sekolah dasar;

d. mengatur program bidang pengelolaan pendidikan sekolah dasar;

e. mengevaluasi kegiatan program pengelolaan pendidikan sekolah dasar;

f. menetapkan kebijakan dan standar operasional pendidikan sekolah dasar, sesuai dengan perencanaan strategis tingkat provinsi dan nasional;

g. mengelola penyelenggaraaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengelolaan pendidikan sekolah dasar;

h. mengelola penyediaan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan sekolah dasar;

i. mengkoordinasikan dan supervisi pengembangan peserta didik sekolah dasar, sarana dan prasarana sekolah dasar, serta guru dan tenaga kependidikan sekolah dasar;

j. melaksanakan kegiatan perumusan peserta didik sekolah dasar, sarana dan prasarana sekolah dasar, serta guru dan tenaga kependidikan sekolah dasar;

k. melaksanakan penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar;

l. melaksanakan pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan sekolah dasar;

m. melaksanakan pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dasar; dan

n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

4. Bidang Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

Bidang Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas

1) Bidang Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian Bidang Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama.

2) Dalam melaksanakan tugas Bidang Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

a. penyiapan rumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama;

b. penyiapan rencana dan program bidang pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama;

c. penyiapan pengendalian di bidang pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama;

d. penyiapan bimbingan di bidang pengelolaan pendidikan sekolah

menengah pertama;

e. pengelolaan administrasi di bidang pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama;

f. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama;

g. pembinana pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama;

h. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama;

i. pelaporan di bidang pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama; dan

j. pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

3) Untuk melaksnakan tugas dan fungsi Kepala Bidang Pengelolan Penddikan Menengah Pertama mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

a. Merencanakan perumusan kebijakan program bidang pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama;

b. membagi tugas program bidang pengelolaan Pendidikan sekolah menengah pertama;

c. memberi petunjuk program pengelolaan pendidikan menengah pertama;

d. mengatur program bidang pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama;

e. mengevaluasi kegiatan program bidang pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama;

f. menetapkan kebijakan dan standar operasional pendidikan Sekolah Menengah Pertama, sesuai dengan perencanaan strategis tingkat provinsi dan nasional;

g. mengelola penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama;

h. mengelola penyediaan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan sekolah menengah pertama;

i. mengoordinasikan dan supervisi pengembangan peserta didik sekolah menengah pertama, sarana prasarana sekolah menengah pertama, serta guru dan tenaga kependidikan sekolah menengah pertama;

j. melaksanakan kegiatan perumusan peserta didik sekolah menengah pertama, sarana prasarana sekolah menengah pertama, serta guru dan tenaga kependidikan sekolah menegah petama;

k. melakasanakan penyediaan dan pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan sekolah menengah pertama;

l. melaksanakan pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan sekolah menengah pertama;

m. melaksanakan pembinaan kelembagaan dan manejemen sekolah menengah pertama;

n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

5. **Bidang Pendidik Tenaga Kependidikan, Bahasa dan Sastra, Kelembagaan Pendidikan, dan Kurikulum Muatan Lokal**

Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Bahasa dan Sastra, Kelembagaan Pendidikan, dan Kurikulum Muatan Lokal yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

1) Bidang Pendidik Tenaga Kependidikan, Bahasa dan Sastra, Kelembagaan Pendidikan, dan Kurikulum Muatan Lokal mempunyai tugas pokok merencanakan operasional, mengelola, mengkordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan pendidik tenaga kependidikan, bahasa dan sastra, kelembagaan pendidikan, dan kurikulum muatan lokal.

a. penyiapan rumusan kebijakan teknis dan perencanaan program kegiatan;

b. penyiapan rencana dan program bidang pendidik tenaga kependidikan, bahasa dan sastra, kelembagaan pendidikan, dan kurikulum muatan lokal;

c. penyiapan pengendalian bidang pendidik tenaga kependidikan, bahasa dan sastra, kelembagaan pendidikan, dan kurikulum muatan lokal;

d. penyiapan bimbingan bidang pendidik tenaga kependidikan, bahasa dan sastra, kelembagaan pendidikan, dan kurikulum muatan lokal;

e. pengelolaan adminstrasi bidang pendidik tenaga kependidikan, bahasa dan sastra, kelembagaan pendidikan, dan kurikulum muatan lokal;

f. penyusunan bahan perumusan dan koodinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolan pendidikan sekolah dasar;

g. pembinaan pelaksanaan kebijakan bidang pendidik tenaga kependidikan, bahasa dan sastra, kelembagaan pendidikan, dan kurikulum muatan lokal untuk meningkatkan kinerja pegawai ;

h. pelaporan di bidang pendidik tenaga kependidikan, bahasa dan sastra, kelembagaan pendidikan, dan kurikulum muatan lokal; dan

i. pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

2) Dalam melaksanakan tugas Bidang Pendidik Tenaga Kependidikan, Bahasa dan Sastra, Kelembagaan Pendidikan, dan Kurikulum Muatan Lokal menyelenggarakan fungsi sebagai berikut

Untuk melaksanakn tugas dan fungsi Kepala Bidang Pendidik Tenaga

Kependidikan, Bahasa dan Sastra, Kelembagaan Pendidikan, dan Kurikulum Muatan Lokal mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

a. merencakana perumusan kebijakan program bidang di bidang pendidik tenaga kependidikan, bahasa dan sastra, kelembagaan pendidikan, dan kurikulum muatan lokal;
b. membagi tugas program bidang pendidik tenaga kependidikan, bahasa dan sastra, kelembagaan pendidikan, dan kurikulum muatan lokal;
c. memberi petunjuk program bidang di bidang pendidik tenaga kependidikan, bahasa dan sastra, kelembagaan pendidikan, dan kurikulum muatan lokal;
d. mengatur program bidang di bidang pendidik tenaga kependidikan, bahasa dan sastra, kelembagaan pendidikan, dan kurikulum muatan lokal;
e. mengevaluasi kegiatan program bidang di bidang pendidik tenaga kependidikan, bahasa dan sastra, kelembagaan pendidikan, dan kurikulum muatan lokal;
f. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di bidang pendidik tenaga kependidikan, bahasa dan sastra, kelembagaan pendidikan, dan kurikulum muatan lokal;
g. mengarahkan dan mengendalikan penyusunan rencana dan program pengembangan baik kualitas maupun kuantitas pendidik tenaga kependidikan, bahasa dan sastra, kelembagaan pendidikan, dan kurikulum muatan lokal;
h. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan monitoring dan pelaksanaan kurikulum muatan lokal pada satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
i. menyusun standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur bidang di bidang pendidik tenaga kependidikan, bahasa dan sastra, kelembagaan pendidikan, dan kurikulum muatan lokal;
j. melaksanakan pemberdayaan peran serta masyarakat di bidang pendidik tenaga kependidikan, bahasa dan sastra, kelembagaan pendidikan, dan kurikulum muatan lokal;
k. melaporkan kegiatan pengelolaan dan penyelenggaraan pengelolaan bidang pendidik tenaga kependidikan, bahasa dan sastra, kelembagaan pendidikan, dan kurikulum muatan lokal;
l. pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

6. UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsioanal

1) UPTD

a. Untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di lingkungan DISDIK dapat di bentuk UPTD.
b. UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab Kepada Kepala Dinas.
c. UPTD dibentuk berdasarkan kriteria adanya pekerjaan yang bersifat teknis operasional karena wilayah kerja atau jam

tertentu.

d. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembetukan oraganisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja UPTD diatur dengan Peraturan Bupati.

2) Kelompok Jabatan Fungsioanal

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang tugasnya. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan Dinas secara profesional sesuai dengan kebutuhan. Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Tiap Kelompok dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada dilingkungan dinas. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Upaya Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan khususnya dalam bidang pelayan dasar Pendidikan melaui capaian program-program pokok dalam bentuk indikator hasil atau outcome yang terelasisasikan melalui kegiatan-kegiatan di masing-masing program pada bidang terkait, dapat dilihat pada indikator kinerja berikut ini :

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang

No.	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian			Proyeksi
				2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025
A.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja									
1	Predikat Nilai AKIP Perangkat Daerah			80,71	80,81	80,91	80,26	73,40	79,55	79,55
2	Persentase Hasil Temuan yang ditindaklanjuti			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B.	Meningkatnya Akses dan layanan PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Kesetaraan yang merata dan berkualitas									
1	Angka Partisipasi Kasar (PAUD)	SPM	V	100,00	100,00	100,00	83,11	85,38	92,11	92,11
2	Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A	SPM	V	100,00	100,00	100,00	104,8	104,12	104,47	104,47
3	Angka Partisipasi Kasar SMP/MTS/Paket B	SPM	V	100,00	100,00	100,00	103,56	106,93	107,34	107,34
4	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	SPM	V	100,00	100,00	100,00	99,17	99,11	99,93	99,93
5	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	SPM	V	100,00	100,00	100,00	96,57	92,87	95,6	95,6
6	Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A	SPM	V	100,00	100,00	100,00	100	100	100	100
7	Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	SPM	V	100,00	100,00	100,00	100	100	100	100
8	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	SPM		1	1	1	0,13	0,10	0,10	0,10
9	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	SPM		1	1	1	0,06	0,05	0,05	0,05
10	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	SPM		100,00	100,00	100,00	100	100	100	100
11	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	SPM		100,00	100,00	100,00	100	100	100	100
12	Angka Lulus Pendidikan Kesetaraan	SPM	V	100,00	100,00	100,00	100	100	100	100

2.3 Isu- isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang

Memasuki tahun 2026, penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dihadapkan pada dinamika kebijakan nasional terkait penyesuaian pendapatan dan efisiensi belanja daerah. Mengacu pada arahan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2025 serta Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi dalam Pelaksanaan APBN dan APBD, Pemerintah Daerah, termasuk Dinas Pendidikan, wajib melakukan langkah-langkah efisiensi dan penyesuaian program kegiatan yang berorientasi pada hasil (outcome-based budgeting).

Kondisi ini menuntut adanya inovasi, optimalisasi sumber daya, serta pemanfaatan teknologi informasi secara efektif untuk mendukung tata kelola pendidikan yang efisien, transparan, dan akuntabel. Strategi efisiensi belanja diarahkan untuk tetap menjamin mutu layanan pendidikan tanpa mengurangi substansi program prioritas, seperti peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan, penguatan pendataan pendidikan dasar dan menengah, serta intervensi bagi wilayah dan kelompok yang masih tertinggal.

Dengan demikian, Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang perlu menyusun langkah-langkah adaptif dan responsif terhadap perubahan kebijakan fiskal nasional tanpa mengabaikan misi utama pembangunan pendidikan, yaitu menciptakan akses dan kualitas pendidikan yang merata dan berkeadilan.

Pendidikan menjadi salah satu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Hal ini berdasar pada Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 31 yang mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan dan wajib mengikuti pendidikan dasar serta pemerintah wajib membiayainya. Begitu pula yang termuat dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia bahwa pendidikan merupakan hak dasar yang berperan penting dalam mengembangkan potensi individu sebagai salah satu elemen penting dalam pengembangan sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia inilah yang akan menentukan kemajuan pembangunan daerah yang berujung pada kemajuan perekonomian nasional dan perkembangan demokrasi di suatu negara.

Mencermati kondisi capaian kinerja pembangunan pendidikan di Kabupaten Tangerang dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, beberapa dimensi pembangunan menunjukan hasil capaian kinerja yang cukup baik, namun beberapa aspek pembangunan lainnya masih menjadi tantangan dan permasalahan yang sangat mendasar, sehingga membutuhkan upaya pembangunan yang lebih terarah dan terpadu secara berkelanjutan. Adapun permasalah serta faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan pendidikan di Kabupaten Tangerang dewasa ini sebagaimana pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.5

Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1.	pelaksanaan wajib belajar Pendidikan Dasar 9 tahun (SD dan SMP)	Akses dan mutu layanan Pendidikan Dasar 9 tahun (SD dan SMP) belum merata	1. Rasio peserta didik terhadap ruang kelas belum ideal 2. Masih terdapat peserta didik yang putus sekolah 3. Belum meratanya fasilitas sarana dan prasarana Pendidikan
	Belum Maksimalnya pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Akses dan mutu layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) belum merata	1. Masih rendahnya peran orang tua terhadap pentingnya Pendidikan Paud bagi pengembangan potensi anak (golden age) 2. Masih kurangnya jumlah TK negeri 3. Terdapat Lembaga PAUD yang belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) 4. Terdapat anak usia PAUD yang belum memperoleh layanan Pendidikan 5. Masih kurangnya sarana dan prasarana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
3	Belum Maksimalnya pelaksanaan Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan	Akses dan mutu layanan Pendidikan Non Forma l/ Kesetaraan belum merata	1. Belum meratanya lembaga pendidikan Non Formal/ Kesetaraan 2. Terdapat Lembaga Non Formal/ Kesetaraan yang belum memenuhi Standar Nasional

			Pendidikan (SNP) 3. Masih terdapat ATS (Anak Tidak Sekolah) yang belum terlayani 4. Masih kurangnya sarana dan prasarana Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan
4	Belum Optimalnya Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1. Masih rendahnya kualifikasi guru Dan tenaga kependidikan	1. Masih rendahnya standar kualifikasi/tingkat Pendidikan pendidik Dan tenaga kependidikan 2. Belum meratanya distribusi pendidik dan tenaga kependidikan Belum optimalnya linearitas pendidikan/program studi pendidik
		2. Masih rendahnya kuantitas dan Kualitas SDM Dalam bidang administrasi sekolah	Kurangnya tenaga administrasi sekolah (TAS) Rendahnya kualitas tenaga administrasi sekolah (TAS)
		3. Kualitas pembelajaran belum maksimal	1. Belum maksimalnya pengembangan potensi, bakat, dan minat peserta didik 2. Masih rendahnya Nilai Rapor Pendidikan 3. Belum maksimal pelaksanaan implementasi kurikulum merdeka 4. Masih kurangnya sarana pendukung pembelajaran

Tata pemerintahan yang baik sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan pembangunan baik di tingkat nasional maupun daerah. Karena itu upaya perbaikan tata pemerintahan yang baik (good governance) merupakan isu strategis yang sangat penting untuk mendorong proses pembangunan daerah yang meliputi transparansi pemerintahan, profesionalisme aparatur daerah, peningkatan pelayanan publik, ketaatan terhadap hukum dan lain-lain. Sehingga reformasi birokrasi dalam hal ini merupakan upaya pokok yang perlu dilakukan.

2.4 Reviu terhadap Rancangan Perubahan RKPD

Perubahan RKPD tahun 2025 menjadi acuan dalam penyusunan rancangan perubahan rencana kerja Perangkat Daerah tahun 2025. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan perangkat daerah Dinas Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang yang secara keseluruhan dapat dilihat pada Tabel di bawah berikut ini :

Tabel 2.6
Reviu Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025 Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	indikator kinerja	target capaian	pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	indikator kinerja	target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Kab. Tangerang	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI; Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD; Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs; Angka Partisipasi Murni (APM) Non Formal/ Kesetaraan	100 angka 100 angka 100 angka 100 angka	888.282.401.252,00	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Kab. Tangerang	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI; Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD; Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs; Angka Partisipasi Murni (APM) Non Formal/ Kesetaraan	100 angka 100 angka 100 angka 100 angka	1.031.690.463.074,00	

	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Kab. Tangerang	Persentase Jumlah Pendidikan Sekolah Dasar yang dikelola Tersedianya Jumlah Pendidikan Sekolah Dasar yang dikelola	100 persen 1038 satuan pendidikan	544.047.301.070,00	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Kab. Tangerang	Persentase Jumlah Pendidikan Sekolah Dasar yang dikelola Tersedianya Jumlah Pendidikan Sekolah Dasar yang dikelola	100 persen 1038 satuan pendidikan	657.279.498.311,00	
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Kab. Tangerang	Persentase Jumlah Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang dikelola Tersedianya Jumlah Pendidikan Sekolah Dasar Yang Dikelola	100 persen 463 satuan pendidikan	278.271.338.050,00	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Kab. Tangerang	Persentase Jumlah Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang dikelola Tersedianya Jumlah Pendidikan Sekolah Dasar Yang Dikelola	100 persen 463 satuan pendidikan	304.193.474.507,00	
	Pengelolaan Pendidikan PAUD	Kab. Tangerang	Persentase Jumlah PAUD yang dikelola Tersedianya Jumlah PAUD Yang Dikelola	100 persen 1360 satuan pendidikan	48.429.279.732,00	Pengelolaan Pendidikan PAUD	Kab. Tangerang	Persentase Jumlah PAUD yang dikelola Tersedianya Jumlah PAUD Yang Dikelola	100 persen 1360 satuan pendidikan	52.870.069.556,00	

	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kab. Tangerang	Persentase Jumlah Non Formal/ Kesetaraan yang dikelola Tersedianya Jumlah Lembaga Non Formal/Kesetaraan Yang Dikelola	100 persen 85 satuan pendidikan	17.534.482.400,00	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kab. Tangerang	Persentase Jumlah Non Formal/ Kesetaraan yang dikelola Tersedianya Jumlah Lembaga Non Formal/Kesetaraan Yang Dikelola	100 persen 85 satuan pendidikan	17.347.420.700,00	
2	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Kab. Tangerang	Rata-rata Capaian Outcome Muatan Kurikulum yang Dikembangkan	100 persen	1.122.938.500,00	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Kab. Tangerang	Rata-rata Capaian Outcome Muatan Kurikulum yang Dikembangkan	100 persen	835.523.500,00	
	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Kab. Tangerang	Tercapainya Satuan Pendidikan Dasar yang Menetapkan Kurikulum Muatan Lokal	100 satuan pendidikan	1.122.938.500,00	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Kab. Tangerang	Tercapainya Satuan Pendidikan Dasar yang Menetapkan Kurikulum Muatan Lokal	100 satuan pendidikan	835.523.500,00	

3	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Kab. Tangerang	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Berkualifikasi minimal D4/S1	90 persen	89.345.390,00	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Kab. Tangerang	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Berkualifikasi minimal D4/S1	90 persen	88.845.390,00	
	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan	Kab. Tangerang	Tersedianya Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan	2 dokumen	89.345.390,00	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan	Kab. Tangerang	Tersedianya Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan	2 dokumen	88.845.390,00	

4	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Kab. Tangerang	Persentase Rekomendasi perizinan Pendidikan yang diterbitkan (PAUD/SD/ SMP dan Pendidikan Non Formal)	80 persen	310.124.050,00	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Kab. Tangerang	Persentase Rekomendasi perizinan Pendidikan yang diterbitkan (PAUD/SD/ SMP dan Pendidikan Non Formal)	80 persen	301.224.050,00	
	Penerbitan Ijin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Kab. Tangerang	Terlaksananya Penerbitan Ijin Operasional Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	80 persen	127.285.700,00	Penerbitan Ijin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Kab. Tangerang	Terlaksananya Penerbitan Ijin Operasional Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	80 persen	118.385.700,00	
	Penerbitan Ijin PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Kab. Tangerang	Terlaksananya Penerbitan Ijin Pendidikan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	75 persen	182.838.350,00	Penerbitan Ijin PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Kab. Tangerang	Terlaksananya Penerbitan Ijin Pendidikan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	75 persen	182.838.350,00	

5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kab. Tangerang	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Dinas Pendidikan	73 Persen	1.279.150.882.964,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kab. Tangerang	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Dinas Pendidikan	73 Persen	1.281.798.702.929,00	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Tangerang	Tersedianya Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 persen 8 dokumen	703.796.500,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Tangerang	Tersedianya Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 persen 8 dokumen	607.161.500,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Tangerang	Tersedianya Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 persen	1.268.549.539.127,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Tangerang	Tersedianya Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 persen	1.272.271.057.312,00	
	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Tangerang	Tersedianya Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 persen	253.650.000,00	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Tangerang	Tersedianya Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 persen	110.960.000,00	

	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Tangerang	Tersedianya Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 persen	547.356.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Tangerang	Tersedianya Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 persen	396.360.000,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Tangerang	Tersedianya Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen	3.363.949.920,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Tangerang	Tersedianya Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen	2.680.572.700,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Tangerang	Tersedianya Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	2.134.075.800,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Tangerang	Tersedianya Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	2.134.075.800,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Tangerang	Tersedianya Jumlah Pemeliharaan Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	3.598.515.617,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Tangerang	Tersedianya Jumlah Pemeliharaan Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	3.598.515.617,00	

Sesuai dengan Perubahan RKPD Tahun 2025, Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang memfokuskan arah kebijakan pada efisiensi belanja nonprioritas tanpa mengurangi kualitas layanan pendidikan. Kegiatan yang tidak memberikan dampak langsung terhadap peningkatan mutu pendidikan disesuaikan kembali, sedangkan program prioritas seperti peningkatan akses pendidikan, mutu pembelajaran, serta penguatan data pendidikan tetap menjadi fokus utama.

Langkah ini diharapkan dapat mendukung pencapaian sasaran pembangunan pendidikan daerah secara efektif, efisien, dan akuntabel sesuai dengan kebijakan fiskal nasional. Selain itu, penyesuaian ini juga bertujuan untuk memaksimalkan layanan dasar di bidang pendidikan, tidak hanya bagi peserta didik, tetapi juga dalam upaya meningkatkan kualitas dan kompetensi pendidik serta tenaga kependidikan secara berkelanjutan.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Tabel 2.7
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Perubahan Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang

No	Program/Kegiatan	Lokasi	indikator kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Kab. Tangerang	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI; Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD; Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs; Angka Partisipasi Murni (APM) Non Formal/ Kesetaraan	100 angka 100 angka 100 angka 100 angka	
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Kab. Tangerang	Persentase Jumlah Pendidikan Sekolah Dasar yang dikelola Tersedianya Jumlah Pendidikan Sekolah Dasar yang dikelola	100 persen 1038 satuan pendidikan	

	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Kab. Tangerang	Persentase Jumlah Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang dikelola Tersedianya Jumlah Pendidikan Sekolah Dasar Yang Dikelola	100 persen 463 satuan pendidikan	
	Pengelolaan Pendidikan PAUD	Kab. Tangerang	Persentase Jumlah PAUD yang dikelola Tersedianya Jumlah PAUD Yang Dikelola	100 persen 1360 satuan pendidikan	
	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kab. Tangerang	Persentase Jumlah Non Formal/ Kesetaraan yang dikelola Tersedianya Jumlah Lembaga Non Formal/Kesetaraan Yang Dikelola	100 persen 85 satuan pendidikan	
2	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Kab. Tangerang	Rata-rata Capaian Outcome Muatan Kurikulum yang Dikembangkan	100 persen	
	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Kab. Tangerang	Tercapainya Satuan Pendidikan Dasar yang Menetapkan Kurikulum Muatan Lokal	100 satuan pendidikan	
3	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Kab. Tangerang	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Berkualifikasi minimal D4/S1	90 persen	
	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan	Kab. Tangerang	Tersedianya Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan	2 dokumen	

4	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Kab. Tangerang	Persentase Rekomendasi perizinan Pendidikan yang diterbitkan (PAUD/SD/SMP dan Pendidikan Non Formal)	80 persen	
	Penerbitan Ijin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Kab. Tangerang	Terlaksananya Penerbitan Ijin Operasional Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	80 persen	
	Penerbitan Ijin PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Kab. Tangerang	Terlaksananya Penerbitan Ijin Pendidikan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	75 persen	
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kab. Tangerang	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Dinas Pendidikan	73 Persen	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Tangerang	Tersedianya Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 persen 8 dokumen	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Tangerang	Tersedianya Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 persen	
	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Tangerang	Tersedianya Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 persen	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Tangerang	Tersedianya Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 persen	

	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Tangerang	Tersedianya Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Tangerang	Tersedianya Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Tangerang	Tersedianya Jumlah Pemeliharaan Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

Dari hasil pembahasan Bab I sampai dengan Bab III di atas, maka disusunlah rencana Program dan Kegiatan Dinas Pendidikan Perubahan untuk Tahun 2025 berdasarkan kebutuhan pembangunan pendidikan Kabupaten Tangerang yang diantaranya memuat :

Mengikuti arahan Surat Edaran Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, serta arahan dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 maka Pemerintah Daerah melakukan efisiensi belanja APBD TA 2025 dengan langkah sebagai berikut :

a. Membatasi belanja untuk kegiatan yang bersifat ceremonial, kajian, studi banding, percetakan, publikasi, dan seminar/focus group discussion;
b. Mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50% (lima puluh persen) untuk seluruh perangkat daerah;
c. Membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran honorarium dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai standar harga satuan regional;
d. Mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki output yang terukur;
e. Memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik serta tidak dilakukan berdasarkan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada tahun anggaran sebelumnya;
f. Lebih selektif dalam memberikan hibah langsung baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa kepada Kementerian/Lembaga, dan ;
g. Melakukan penyesuaian belanja APBD Tahun Anggaran 2025 yang bersumber dari Trasfer Ke Daerah (TKD).

Rencana Perubahan Program dan Kegiatan Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.1
Rencana Perubahan Program dan Kegiatan Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Tahun 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	KPD 2025	PBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PENDIDIKAN							**2.002.943.628.379,00**	**2.168.955.692.156,00**	**2.314.714.758.943,00**	**311.771.130.564,00**							**2.129.364.683.024,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**2.002.943.628.379,00**	**2.168.955.692.156,00**	**2.314.714.758.943,00**	**311.771.130.564,00**							**2.129.364.683.024,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN**							**2.002.943.628.379,00**	**2.168.955.692.156,00**	**2.314.714.758.943,00**	**311.771.130.564,00**							**2.129.364.683.024,00**	

		BIDANG PENDIDIKAN																	
1,	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Dinas Pendidikan**				**74 Persen**	**74 Persen**	**1.199.333.305.479,00**	**1.279.150.882.964,00**	**1.281.798.702.929,00**	**98.910.037.050,00**							**1.298.243.342.529,00**	
	1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Tersedianya Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				100 persen 8 Dokumen	100 persen 8 Dokumen	814.582.800,00	703.796.500,00	607.161.500,00	-207.421.300,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	aparatur pemerintah		1.013.273.600,00	DINAS PENDIDIKAN

	1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	533.663.200,00	585.660.000,00	503.625.000,00	-30.038.200,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik		679.644.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-				1 Dokumen	1 Dokumen	106.457.600,00	20.182.500,00	20.182.500,00	-86.275.100,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Menin			106.457.600,00	DINAS PENDIDIKAN

			SKPD											pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	gkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik				
	1.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	23.248.000,00	30.795.000,00	30.795.000,00	7.547.000,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			48.748.500,00	DINAS PENDIDIKAN

	1.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	11.354.000,00	11.992.500,00	11.992.500,00	638.500,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			15.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen				1 Dokumen	1 Dokumen	13.788.000,00	17.415.000,00	17.415.000,00	3.627.000,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Menin			15.603.500,00	DINAS PENDIDIKAN

			Perubahan DPA-SKPD											pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	gkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik				
	1.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	13.252.000,00	11.471.500,00	11.471.500,00	-1.780.500,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			15.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN

	1.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	112.820.000,00	26.280.000,00	11.680.000,00	-101.140.000,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			132.820.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Tersedianya Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				100 Persen	100 Persen	1.190.225.130.479,00	1.268.549.539.127,00	1.272.271.057.312,00	82.045.926.833,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyel	aparatur pemerintah		1.290.225.130.479,00	DINAS PENDIDIKAN

															pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	enggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik				
	1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				9375 Orang/bulan	9375 Orang/bulan	1.189.245.072.879,00	1.267.811.339.127,00	1.271.657.057.312,00	82.411.984.433,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DAU YANG	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			1.289.245.072.879,00	DINAS PENDIDIKAN

														DITENTUKAN PENGGUNAAN YA BIDANG PENDIDIKAN						
	1.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	2 Laporan	117.865.000,00	110.000.000,00	110.000.000,00	-7.865.000,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyel	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia			117.865.000,00	DINAS PENDIDIKAN

															udupa n.					
	1.01.01 .2.02.0 007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan a n/Semesteran SKPD				5 Lap oran	5 Lap oran	862.192. 600,00	628.200. 000,00	504.000. 000,00	- 358.192.6 00,00	Kab. Tang eran g, Sem ua Keca matan, Sem ua Kel/ Desa	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)	Memp erkuat refor masi politik , huku m dan birokr asi, serta memp erkuat pence gahan dan pembe rantas an korup si, narko ba, judi, dan penyel udupa n.	Menin gkatka n Pemba ngunan Sumbe r Daya Manusi a Menin gkatka n Pemba ngunan Sumbe r Daya Manusi a			862.192. 600,00	DINA S PEND IDIK AN

	1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Tersediannya Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*				100 Persen	100 Persen	285.260.000,00	253.650.000,00	110.960.000,00	-174.300.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	aparatur pemerintah		287.139.600,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																	
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	81.760.000,00	71.150.000,00	23.360.000,00	-58.400.000,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyel			100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN

															pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	enggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik				
	1.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	203.500.000,00	182.500.000,00	87.600.000,00	-115.900.000,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			187.139.600,00	DINAS PENDIDIKAN

	1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Tersediannya Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				100 Persen	100 Persen	1.100.480.000,00	547.356.000,00	396.360.000,00	-704.120.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	aparatur pemerintah		478.320.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																	
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	115.200.000,00	61.400.000,00	61.400.000,00	-53.800.000,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyel			104.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN

															pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	enggaran Tata Kelola Pemerintahan yang Baik				
	1.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				100 Orang	25 Orang	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			72.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		

			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				150 Orang	280 Orang	905.280.000,00	405.956.000,00	254.960.000,00	-650.320.000,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			301.320.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Tersedianya Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 Persen	100 Persen	3.055.632.400,00	3.363.949.920,00	2.680.572.700,00	-375.059.700,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata	aparatur pemerintah		2.409.734.050,00	DINAS PENDIDIKAN

															korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Kelola Pemerintahan yang Baik				
	1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	30.806.000,00	30.806.000,00	30.806.000,00	0,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			30.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	831.504.000,00	862.454.000,00	862.454.000,00	30.950.000,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			705.067.700,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	118.528.400,00	118.528.400,00	118.528.400,00	0,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyel			118.527.500,00	DINAS PENDIDIKAN

															pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	enggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik				
	1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	256.645.000,00	256.645.000,00	256.645.000,00	0,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			250.870.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		

			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	205.900.000,00	401.133.520,00	316.661.300,00	110.761.300,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	140.000.000,00	140.000.000,00	140.000.000,00	0,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyel			136.128.850,00	DINAS PENDIDIKAN

														pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	enggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik				
	1.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			12 Laporan	12 Laporan	639.700.000,00	596.400.000,00	429.595.000,00	-210.105.000,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			343.600.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	

			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	730.549.000,00	864.083.000,00	431.983.000,00	-298.566.000,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			540.540.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	102.000.000,00	93.900.000,00	93.900.000,00	-8.100.000,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyel			85.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN

														pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	enggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik				
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 persen	100 persen	1.847.047.800,00	2.134.075.800,00	2.134.075.800,00	287.028.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	aparatur pemerintah		1.740.229.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																	

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	21.400.000,00	21.400.000,00	21.400.000,00	0,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			20.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	12 Laporan	733.843.800,00	949.843.800,00	949.843.800,00	216.000.000,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyel			551.643.000,00	DINAS PENDIDIKAN

															pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	enggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik				
	1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	12 Laporan	1.091.804.000,00	1.162.832.000,00	1.162.832.000,00	71.028.000,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			1.168.586.000,00	DINAS PENDIDIKAN

	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Ketersediaan Pemeliharaan Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 persen	100 persen	2.005.172.000,00	3.598.515.617,00	3.598.515.617,00	1.593.343.617,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	aparatur pemerintah		2.089.515.800,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				21 Unit	21 Unit	606.555.800,00	575.194.416,00	575.194.416,00	-31.361.384,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyel			606.555.800,00	DINAS PENDIDIKAN

														pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	enggaran Tata Kelola Pemerintahan yang Baik				
	1.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	7 Unit	1.220.116.200,00	2.844.821.201,00	2.844.821.201,00	1.624.705.001,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			1.304.460.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	

			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	105 Unit	178.500.000,00	178.500.000,00	178.500.000,00	0,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			178.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN
2,	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Angka Partisipasi Murni Sekolah Dasar (APM SD/MI)**				**100 100 angka Angka**	**100 angka**	**801.850.324.700,00**	**888.282.401.252,00**	**1.031.690.463.074,00**	**27.396.015.695,00**							**829.246.340.395,00**	

	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Persentase Jumlah Pendidikan Sekolah Dasar yang dikelola Tersedianya Jumlah Pendidikan Sekolah Dasar yang dikelola*				100 Persen 1038 Satuan Pendidikan	100 Persen 1038 Satuan Pendidikan	483.610.690.747,00	544.047.301.070,00	657.279.498.311,00	173.668.807.564,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia	masyarakat umum		493.904.365.307,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)																	

	001																		
			Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun				2 Unit	4 Unit	6.050.000.000,00	8.721.715.785,00	12.195.887.190,00	6.145.887.190,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia			6.100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN

	1.01.02.2.01.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah																	
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				2 Ruang	2 Ruang	1.107.052.560,00	0,00	0,00	-1.107.052.560,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DAK FISIK - BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabil	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia			1.207.052.560,00	DINAS PENDIDIKAN

															itas.					
	1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				25 Unit	22 Unit	4.000.000.000,00	3.125.470.000,00	4.077.846.000,00	77.846.000,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta pengu	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia			4.300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN

															atan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	1.01.02.2.01.0009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																		
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Ruang	2 Ruang	446.553.440,00	0,00	111.450.000.000,00	111.003.446.560,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK FISIK - BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia			500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN

															penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah																		
			Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia				60 Paket	95 Paket	4.029.025.562,00	4.161.444.000,00	7.143.050.000,00	3.114.024.438,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender,	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia			4.229.025.562,00	DINAS PENDIDIKAN

															serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa																		
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi /Lomba Akademik dan Non Akademik				1450 Peserta Didik	2175 Peserta Didik	1.500.000.000,00	1.612.187.000,00	1.473.091.900,00	-26.908.100,00	Semua Kota /Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gende	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia			1.700.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN

													Kel/ Desa		r, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar				3237 Orang	3237 Orang	55.647.154.000,00	55.557.384.000,00	55.995.546.400,00	348.392.400,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia			55.647.154.000,00	DINAS PENDIDIKAN

															gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/ Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				1200 Orang	1200 Orang	1.000.150.000,00	499.169.700,00	373.836.000,00	-626.314.000,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, keseta	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia			1.000.150.000,00	DINAS PENDIDIKAN

															raan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah				230 Satuan Pendidikan	950 Satuan Pendidikan	2.436.897.705,00	1.257.058.000,00	1.182.508.000,00	-1.254.389.705,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga,	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia			2.436.897.705,00	DINAS PENDIDIKAN

															keseteraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																	
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				993 Sekolah Satuan Pendidikan	1026 Satuan Pendidikan	297.811.990.000,00	305.748.430.000,00	306.070.814.786,00	8.258.824.786,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahra	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia			297.811.990.000,00	DINAS PENDIDIKAN

															ga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	1.01.02.2.01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar				993 Orang	1026 Orang	20.642.979.400,00	20.746.200.000,00	20.599.173.600,00	-43.805.800,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia			22.642.979.400,00	DINAS PENDIDIKAN

														olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	1.01.02.2.01.0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar																	
			Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun				6 Ruang	6 Ruang	3.036.052.720,00	0,00	0,00	-3.036.052.720,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DAK FISIK - BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, presta	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia			3.336.052.720,00	DINAS PENDIDIKAN

															si olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	1.01.02.2.01.0035	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				260 Orang	260 Orang	150.960.000,00	151.650.000,00	151.650.000,00	690.000,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan,	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia			180.960.000,00	DINAS PENDIDIKAN

															prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	1.01.02.2.01.0036	Pengembangan konten digital untuk pendidikan																		
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan				1 Konten Digital	1 Konten Digital	23.606.000,00	23.212.000,00	23.212.000,00	-394.000,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, keseh	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusi			50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN

															atan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	a				
	1.01.02.2.01.0037	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan																		
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				220 Orang	220 Orang	56.166.000,00	55.500.000,00	55.500.000,00	-666.000,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan,	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya			100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN

															keseh atan, presta si olahra ga, keseta raan gende r, serta pengu atan peran perem puan, pemu da (gener asi mileni al dan generas i Z), dan penya ndang disabil itas.	Manusi a				
	1.01.02 .2.01.0 038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																		

			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				2 Dokumen	2 Dokumen	311.364.000,00	259.260.000,00	84.390.000,00	-226.974.000,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia			351.364.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan																		

	039																		
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	101.120.000,00	138.306.000,00	138.306.000,00	37.186.000,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia			151.120.000,00	DINAS PENDIDIKAN

	1.01.02.2.01.0041	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan																	
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				273 Komunitas	273 Komunitas	410.800.000,00	407.160.000,00	201.480.000,00	-209.320.000,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabil	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia			510.800.000,00	DINAS PENDIDIKAN

															itas.					
	1.01.02.2.01.0043	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi																		
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				29 Kegiatan	29 Kegiatan	200.344.000,00	369.658.000,00	364.825.000,00	164.481.000,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta pengu	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia			250.344.000,00	DINAS PENDIDIKAN

															atan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru																		
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				160 Ruang	134 Ruang	55.000.000.000,00	51.347.896.165,00	67.280.430.908,00	12.280.430.908,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia			59.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN

															penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	1.01.02.2.01.0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan																		
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/ PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				1200 Orang	1200 Orang	400.500.000,00	617.215.000,00	574.880.000,00	174.380.000,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender,	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia			400.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN

															serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik																		
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				1013 Satuan Pendidikan	1013 Satuan Pendidikan	143.464.000,00	145.640.000,00	145.640.000,00	2.176.000,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gende	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia			143.464.000,00	DINAS PENDIDIKAN

															r, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah																		
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				89 Ruang	228 Ruang	22.554.511.360,00	22.262.269.985,00	47.822.320.837,00	25.267.809.477,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia			24.554.511.360,00	DINAS PENDIDIKAN

															gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																		
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				6400 Peserta Didik	24092 Peserta Didik	4.950.000.000,00	66.315.253.745,00	19.349.888.000,00	14.399.888.000,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, keseta	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia			5.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN

															raan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	1.01.02.2.01.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik																		
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia				16 Paket	16 Paket	1.600.000.000,00	525.221.690,00	525.221.690,00	-1.074.778.310,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DAK FISIK - BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga,	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia			1.800.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN

															keseteraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	*Persentase Jumlah Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang dikelola Tersedianya Jumlah Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang dikelola*				100 Persen 463 Satuan Pendidikan	100 Persen 463 Satuan Pendidikan	262.317.074.949,00	278.271.338.050,00	304.193.474.507,00	41.876.399.558,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, keseteraan	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia	masyarakat umum		280.703.711.345,00	DINAS PENDIDIKAN

															gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	1.01.02.2.02.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)																		
			Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun				2 Unit	2 Unit	11.525.148.000,00	9.808.876.000,00	9.838.876.000,00	-1.686.272.000,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, keseta	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia			12.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN

															raan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	1.01.02.2.02.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																		
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				5 Ruang	1 Ruang	500.018.000,00	853.170.000,00	853.170.000,00	353.152.000,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga,	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia		1.500.018.000,00	DINAS PENDIDIKAN

															keseta raan gende r, serta pengu atan peran perem puan, pemu da (gener asi mileni al dan generasi Z), dan penya ndang disabil itas.					
	1.01.02 .2.02.0 004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah																	
			Jumlah Ruang Unit Kesehata n Sekolah yang Telah Dibangun				4 Rua ng	4 Rua ng	1.197.90 0.000,00	0,00	0,00	- 1.197.900 .000,00	Kab. Tange rang, Sem ua Keca matan, Sem ua Kel/ Desa	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)	Memp erkuat pemba ngunan sumbe r daya manus ia (SDM), sains, teknol ogi, pendi dikan, keseh atan, presta si olahra	Menin gkatka n Pemba ngunan Sumbe r Daya Manusi a Menin gkatka n Pemba ngunan Sumbe r Daya Manusi a			1.397.98 6.400,00	DINA S PEND IDIK AN

															ga, keseteraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	1.01.02.2.02.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah																		
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				5 Ruang	5 Ruang	957.182.000,00	0,00	0,00	-957.182.000,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia			1.957.182.000,00	DINAS PENDIDIKAN

														olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	1.01.02.2.02.0006	Pembangunan Laboratorium																	
			Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun				10 Ruang	10 Ruang	6.179.180.600,00	0,00	0,00	-6.179.180.600,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, presta	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia			7.179.180.600,00	DINAS PENDIDIKAN

															si olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				20 Unit	14 Unit	6.152.173.822,00	2.570.220.000,00	8.832.354.650,00	2.680.180.828,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan,	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia			7.152.173.822,00	DINAS PENDIDIKAN

															prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah																		
			Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				90 Ruang	67 Ruang	20.048.038.020,00	3.430.144.000,00	13.004.092.000,00	-7.043.946.020,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, keseh	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusi			21.048.038.020,00	DINAS PENDIDIKAN

														atan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	a				
	1.01.02.2.02.0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah																	
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			5 Ruang	5 Ruang	200.012.400,00	0,00	0,00	-200.012.400,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan,	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya			600.012.400,00	DINAS PENDIDIKAN

															keseh atan, presta si olahra ga, keseta raan gende r, serta pengu atan peran perem puan, pemu da (gener asi mileni al dan generasi Z), dan penya ndang disabil itas.	Manusi a				
	1.01.02 .2.02.0 018	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium																		

			Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				5 Ruang	5 Ruang	603.417.650,00	0,00	0,00	-603.417.650,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia			803.417.650,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																	

	024																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				5 Unit	5 Unit	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia			1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN

	1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah																	
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				85 Paket	85 Paket	6.050.557.003,00	5.488.870.000,00	6.391.150.000,00	340.592.997,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabil	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia			7.050.557.003,00	DINAS PENDIDIKAN

															itas.					
	1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama																		
			Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				2110 Peserta Didik	25869 Peserta Didik	2.636.523.600,00	42.110.763.326,00	28.085.900.000,00	25.449.376.400,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta pengu	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia			3.217.189.600,00	DINAS PENDIDIKAN

															atan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa																		
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi /Lomba Akademik dan Non Akademik				2552 Peserta Didik	2552 Peserta Didik	1.461.669.600,00	1.302.145.500,00	1.202.478.400,00	-259.191.200,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia			1.474.013.600,00	DINAS PENDIDIKAN

															penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	1.01.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				1467 Orang	1467 Orang	20.432.044.000,00	20.343.406.000,00	20.322.998.500,00	-109.045.500,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender,	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia			20.432.044.300,00	DINAS PENDIDIKAN

															serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/ Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				550 Orang	800 Orang	599.964.000,00	341.824.790,00	254.669.000,00	-345.295.000,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gende	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia			600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN

															r, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah																		
			Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan				156 Satuan Pendidikan	217 Satuan Pendidikan	16.658.213.700,00	19.151.221.300,00	19.119.171.100,00	2.460.957.400,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia			16.658.213.700,00	DINAS PENDIDIKAN

															gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama																		
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				430 Satuan Pendidikan	430 Satuan Pendidikan	139.418.020.000,00	139.418.020.000,00	139.558.962.723,00	140.942.723,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, keseta	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia			139.418.020.000,00	DINAS PENDIDIKAN

															raan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	1.01.02.2.02.0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama																		
			Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama				70000 Orang	430 Orang	3.847.620.000,00	3.847.120.000,00	3.814.270.000,00	-33.350.000,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga,	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia			3.847.620.000,00	DINAS PENDIDIKAN

															keseteraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	1.01.02.2.02.0048	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan																	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				23000 Orang	23000 Orang	2.866.580.000,00	2.850.000.000,00	2.850.000.000,00	-16.580.000,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahra	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia			2.866.650.000,00	DINAS PENDIDIKAN

															ga, keseta raan gende r, serta pengu atan peran perem puan, pemu da (gener asi mileni al dan generasi Z), dan penya ndang disabil itas.					
	1.01.02 .2.02.0 049	Pengembangan konten digital untuk pendidikan																		
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan				1 Konten Digital	1 Konten Digital	124.820.000,00	97.580.000,00	76.810.000,00	-48.010.000,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia			124.591.000,00	DINAS PENDIDIKAN

															olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	1.01.02.2.02.0050	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan																		
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				300 Orang	500 Orang	146.800.000,00	306.180.000,00	255.820.000,00	109.020.000,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, presta	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia			213.796.000,00	DINAS PENDIDIKAN

															si olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	1.01.02.2.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				1 Dokumen	1 Dokumen	101.500.000,00	62.104.000,00	47.100.000,00	-54.400.000,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan,	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia			101.635.600,00	DINAS PENDIDIKAN

															prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	1.01.02.2.02.0052	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan																		
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	97.255.000,00	73.529.960,00	73.529.960,00	-23.725.040,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, keseh	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusi			101.402.500,00	DINAS PENDIDIKAN

															atan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	a				
	1.01.02.2.02.0054	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan																		
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				11 Komunitas	11 Komunitas	83.270.000,00	100.266.400,00	100.266.400,00	16.996.400,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan,	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya			81.804.300,00	DINAS PENDIDIKAN

															keseh atan, presta si olahra ga, keseta raan gende r, serta pengu atan peran perem puan, pemu da (gener asi mileni al dan generasi Z), dan penya ndang disabil itas.	Manusi a				
	1.01.02 .2.02.0 055	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi																		

			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				1 Kegiatan	1 Kegiatan	143.300.000,00	131.960.000,00	94.860.000,00	-48.440.000,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia			154.604.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik																		

	058																		
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar				430 Satuan Pendidikan	430 Satuan Pendidikan	527.435.000,00	894.975.200,00	731.675.200,00	204.240.200,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia			500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN

	1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru																	
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				36 Ruang	70 Ruang	15.257.530.054,00	24.414.034.000,00	28.843.544.000,00	13.586.013.946,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabil	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia			25.242.378.350,00	DINAS PENDIDIKAN

															itas.					
	1.01.02.2.02.0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan																		
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/ PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				150 Orang	250 Orang	169.720.000,00	193.541.500,00	160.390.500,00	-9.329.500,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta pengu	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia			150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN

															atan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	1.01.02.2.02.0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																		
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				5 Ruang	5 Ruang	3.581.182.500,00	0,00	19.200.000.000,00	15.618.817.500,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia			3.581.182.500,00	DINAS PENDIDIKAN

															penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	1.01.02.2.02.0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik																		
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia				4 Paket	8 Paket	250.000.000,00	481.386.074,00	481.386.074,00	231.386.074,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DAK FISIK - BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender,	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia			250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN

															serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	*Jumlah PAUD yang dikelola Persentase Jumlah PAUD yang dikelola*				100 Persen 1360 lembaga	100 Persen 1360 lembaga	39.809.676.604,00	48.429.279.732,00	52.870.069.556,00	13.060.392.952,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta pengu	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia	masyarakat umum		37.309.699.770,00	DINAS PENDIDIKAN

															atan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun				20 Unit	9 Unit	1.019.203.000,00	1.866.198.436,00	4.359.462.040,00	3.340.259.040,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia			1.019.203.000,00	DINAS PENDIDIKAN

															penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	1.01.02.2.03.0007	Pengadaan Mebel PAUD																		
			Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia				20 Paket	30 Paket	248.086.020,00	248.659.000,00	548.872.000,00	300.785.980,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender,	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia			248.086.020,00	DINAS PENDIDIKAN

															serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	1.01.02.2.03.0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD																		
			Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia				60 Paket	11 Paket	150.000.000,00	155.502.600,00	155.502.600,00	5.502.600,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gende	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia			150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN

															r, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	1.01.02.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD				200 Orang	1200 Orang	1.939.302.340,00	4.175.524.000,00	4.175.524.000,00	2.236.221.660,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia			939.302.340,00	DINAS PENDIDIKAN

															gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/ Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				30 Orang	300 Orang	69.999.710,00	5.086.700.000,00	5.086.700.000,00	5.016.700.290,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, keseta	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia			69.999.710,00	DINAS PENDIDIKAN

															raan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD																		
			Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				3 Satuan Pendidikan	161 Satuan Pendidikan	1.000.000.000,00	1.469.630.000,00	1.469.630.000,00	469.630.000,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga,	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia			1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN

															keseteraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD																		
			Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP				1400 Satuan Pendidikan	1400 Satuan Pendidikan	29.356.910.000,00	29.906.800.000,00	29.908.632.280,00	551.722.280,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahra	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia			29.356.910.000,00	DINAS PENDIDIKAN

															ga, keseta raan gende r, serta pengu atan peran perem puan, pemu da (gener asi mileni al dan generasi Z), dan penya ndang disabil itas.					
	1.01.02 .2.03.0 019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD																		
			Jumlah Tenaga yang Meningka t Kapasitas nya dalam Pengelola an Dana BOP PAUD				130 0 Ora ng	130 0 Ora ng	443.450. 000,00	440.676. 000,00	391.048. 000,00	- 52.402.00 0,00	Kab. Tange rang, Sem ua Keca matan, Sem ua Kel/ Desa	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)	Memp erkuat pemba nguna n sumbe r daya manus ia (SDM), sains, teknol ogi, pendi dikan, keseh atan, presta si	Menin gkatka n Pemba ngunan Sumbe r Daya Manusi a Menin gkatka n Pemba ngunan Sumbe r Daya Manusi a			443.450. 000,00	DINA S PEND IDIK AN

															olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	1.01.02.2.03.0023	Pengembangan konten digital untuk pendidikan																		
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan				1 Konten Digital	20 Konten Digital	25.404.138,00	189.240.000,00	113.180.000,00	87.775.862,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, presta	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia		25.427.300,00	DINAS PENDIDIKAN

															si olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	1.01.02.2.03.0024	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan																		
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				1400 Orang	1300 Orang	116.248.600,00	165.100.000,00	137.240.000,00	20.991.400,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan,	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia		116.248.600,00	DINAS PENDIDIKAN

															prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	1.01.02.2.03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				3 Dokumen	3 Dokumen	241.422.899,00	406.776.000,00	209.336.000,00	-32.086.899,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, keseh	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusi			241.422.900,00	DINAS PENDIDIKAN

															atan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	a				
	1.01.02.2.03.0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan																		
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				6 Dokumen	3 Dokumen	420.396.500,00	185.550.000,00	185.550.000,00	-234.846.500,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan,	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya			420.396.500,00	DINAS PENDIDIKAN

															keseh atan, presta si olahra ga, keseta raan gende r, serta pengu atan peran perem puan, pemu da (gener asi mileni al dan generas i Z), dan penya ndang disabil itas.	Manusi a				
	1.01.02 .2.03.0 029	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan																		

			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				200 Komunitas	20 Komunitas	106.949.300,00	118.220.000,00	76.500.000,00	-30.449.300,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia			106.949.300,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0	Pembangunan Ruang Kelas Baru																		

	030																		
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				17 Ruang	4 Ruang	919.472.997,00	952.275.996,00	1.359.178.614,00	439.705.617,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia			919.473.000,00	DINAS PENDIDIKAN

	1.01.02.2.03.0039	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan																	
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/ PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				400 Orang	200 Orang	239.395.800,00	133.660.000,00	126.770.000,00	-112.625.800,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabil	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia			239.395.800,00	DINAS PENDIDIKAN

															itas.					
	1.01.02.2.03.0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																		
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				4200 Paket	9250 Paket	395.868.800,00	395.900.000,00	395.900.000,00	31.200,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK FISIK - BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-PAUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta pengu	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia			395.868.800,00	DINAS PENDIDIKAN

															atan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	1.01.02.2.03.0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD																		
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia				60 Paket	26 Paket	222.566.500,00	664.963.600,00	664.963.600,00	442.397.100,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK FISIK - BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-PAUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia			222.566.500,00	DINAS PENDIDIKAN

															penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	1.01.02.2.03.0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD																	
			Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar				1400 Satuan Pendidikan	300 Satuan Pendidikan	1.895.000.000,00	1.131.525.000,00	1.131.525.000,00	-763.475.000,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender,	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia			895.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN

															serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	1.01.02.2.03.0049	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																		
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat				10 Ruang	10 Ruang	500.000.000,00	0,00	1.350.000.000,00	850.000.000,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gende	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia		500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN

															r, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	1.01.02.2.03.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah																		
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Ruang	3 Ruang	500.000.000,00	736.379.100,00	1.024.555.422,00	524.555.422,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN

														gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	*Jumlah Non Formal/ Kesetaraan yang dikelola Persentase Jumlah Non Formal/ Kesetaraan yang dikelola*				100 Persen 85 lembaga	100 Persen 85 lembaga	16.112.882.400,00	17.534.482.400,00	17.347.420.700,00	1.234.538.300,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender,	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia	masyarakat umum		17.328.563.973,00	DINAS PENDIDIKAN

															serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	1.01.02.2.04.0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan																		
			Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				400 Peserta Didik	400 Peserta Didik	2.098.400.000,00	2.097.510.000,00	2.059.790.000,00	-38.610.000,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gende	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia			3.682.854.690,00	DINAS PENDIDIKAN

														r, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	1.01.02.2.04.0014	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan																	
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				12 Orang	12 Orang	99.942.400,00	99.942.400,00	99.942.400,00	0,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia			100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN

															gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan																		
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				88 Satuan Pendidikan	88 Satuan Pendidikan	895.350.000,00	489.335.000,00	381.385.000,00	-513.965.000,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, keseta	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia			500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN

															raan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan																		
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP				75 Satuan Pendidikan	75 Satuan Pendidikan	10.116.390.000,00	13.604.370.000,00	13.604.370.000,00	3.487.980.000,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga,	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia			10.116.390.000,00	DINAS PENDIDIKAN

															keseteraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	1.01.02.2.04.0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				1 Dokumen	1 Dokumen	89.170.000,00	87.965.000,00	67.715.000,00	-21.455.000,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahra	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia			114.584.800,00	DINAS PENDIDIKAN

															ga, keseteraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik																		
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				165 Peserta Didik	165 Peserta Didik	326.430.000,00	338.490.000,00	317.348.300,00	-9.081.700,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia			326.523.483,00	DINAS PENDIDIKAN

														olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	1.01.02.2.04.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan																	
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia				8 Paket	8 Paket	1.708.500.000,00	0,00	0,00	-1.708.500.000,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, presta	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia		1.709.576.000,00	DINAS PENDIDIKAN

															si olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	1.01.02.2.04.0061	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah																		
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	2 Ruang	778.700.000,00	816.870.000,00	816.870.000,00	38.170.000,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan,	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia			778.635.000,00	DINAS PENDIDIKAN

															prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
3,	**1.01.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**	**Rata-rata Capaian Outcome Muatan Kurikulum yang Dikembangkan**				**100 persen**	**100 persen**	**1.324.999.900,00**	**1.122.938.500,00**	**835.523.500,00**	**25.000.200,00**							**1.350.000.100,00**	

	1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	*Tercapainya Satuan Pendidikan Dasar yang Menetapkan Kurikulum Muatan Lokal*				30 Satuan Pendidikan	30 Satuan Pendidikan	1.324.999.900,00	1.122.938.500,00	835.523.500,00	-489.476.400,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia	masyarakat umum		1.350.000.100,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.03.2.01.0	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar																	

	002																	
			Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun				1 Dokumen	3 Dokumen	200.000.100,00	252.840.000,00	187.695.000,00	-12.305.100,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia			200.000.100,00	DINAS PENDIDIKAN

	1.01.03.2.01.0006	Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar																	
			Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar yang tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	999.999.800,00	772.718.000,00	552.548.000,00	-447.451.800,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabil	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia			1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN

															itas.					
	1.01.03.2.01.0007	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	125.000.000,00	97.380.500,00	95.280.500,00	-29.719.500,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta pengu	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia			150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN

														atan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
4,	**1.01.04**	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	**Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Berkualifikasi minimal D4/S1**				**91 Persen**	**91 Persen**	**99.999.900,00**	**89.345.390,00**	**88.845.390,00**	**20.000.100,00**							**120.000.000,00**	
	1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan	*Tersedianya Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidika*				2 Dokumen	2 Dokumen	99.999.900,00	89.345.390,00	88.845.390,00	-11.154.510,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan,	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia	masyarakat umum		120.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN

		Nonformal/Kesetaraan	*n Non Formal/ Kesetaraan*												prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan				1 Dokumen	1 Dokumen	49.999.950,00	39.905.690,00	39.905.690,00	-10.094.260,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, keseh	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusi			60.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN

			Pendidikan Nonformal/Kesetaraan												atan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	a				
	1.01.04.2.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan																	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar,				1 Laporan	1 Laporan	49.999.950,00	49.439.700,00	48.939.700,00	-1.060.250,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan,	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya			60.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN

			PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan											keseh atan, presta si olahra ga, keseta raan gende r, serta pengu atan peran perem puan, pemu da (gener asi mileni al dan genera si Z), dan penya ndang disabil itas.	Manusi a				
5 ,	**1.01.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN**	**Persentase Rekomendasi perizinan Pendidikan yang diterbitkan (PAUD/SD/SMP dan Pendidikan Non Formal)**				**85 Persen**	**85 Persen**	**334.998.400,00**	**310.124.050,00**	**301.224.050,00**	**70.001.600,00**							**405.000.000,00**	

	1.01.05.2.01	Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	*Persentase Satuan Pendidikan yang melakukan Penerbitan Ijin Operasional Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh Masyarakat Terlaksanya Penerbitan Ijin Operasional Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat*				100 lembaga 85 Persen	100 lembaga 85 Persen	129.995.800,00	127.285.700,00	118.385.700,00	-11.610.100,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia	masyarakat umum		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.05.2.01.0	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat																	

	001																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	64.997.800,00	64.496.200,00	58.396.200,00	-6.601.600,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia			75.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN

	1.01.05.2.01.0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat																	
			Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	64.998.000,00	62.789.500,00	59.989.500,00	-5.008.500,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabil	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia			75.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN

															itas.				
	1.01.05.2.02	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	*Persentase Satuan Pendidikan yang melakukan Penerbitan Ijin Pendidikan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang diselenggarkan oleh Masyarakat Terlaksananya Penerbitan Ijin Pendidikan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang*				100 lembaga 77 Persen	100 lembaga 77 Persen	205.002.600,00	182.838.350,00	182.838.350,00	-22.164.250,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perem	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia	masyarakat umum		255.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN

			Diselenggarakan oleh Masyarakat											puan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	1.01.05.2.02.0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat																	
			Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	52.497.000,00	52.024.000,00	52.024.000,00	-473.000,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta pengu	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia			75.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN

															atan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	1.01.05.2.02.0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	52.514.200,00	52.064.450,00	52.064.450,00	-449.750,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia			60.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN

															penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	1.01.05.2.02.0003	Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	99.991.400,00	78.749.900,00	78.749.900,00	-21.241.500,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender,	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia			120.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN

															serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.						
	J U M L A H								**2.002.943.628.379,00**	**2.168.955.692.156,00**	**2.314.714.758.943,00**	**1.284.717.462.164,00**						**2.129.364.683.024,00**	

BAB IV
PENUTUP

1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian

Keberhasilan sektor Pendidikan harus dimulai dari perencanaan yang baik dan cermat. Rencana Kinerja (Renja) Tahunan Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang merupakan dokumen perencanaan yang penting untuk dipedomani sebagai arah bagi pelaksaan program dan kegiatan tahun 2025 di lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang, guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah tahun 2025 yang tercantum dalam Rencana Kerja Pembangunan daerah Perubahan Tahun 2025. Rencana Kerja Perubahan Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang tahun 2025 telah disusun dengan memperhatikan perkembangan lingkungan strategis yang terjadi dan diperhitungkan akan berpengaruh terhadap bidang pembangunan pendidikan. Namun demikian, rencana kerja (renja) bukanlah dokumen yang bersifat kaku dan terbatas, melainkan dokumen yang fleksibel dan terbuka terhadap perubahan. Apabila dalam proses pelaksanaan program dan kegiatan terjadi perkembangan dan perubahan, baik dari faktor eksternal maupun internal, maka komponen dalam renja mulai dari tujuan, sasaran, program dan kegiatan maupun target indikator kinerja dapat dirubah sesuai dengan situasi dan kondisi terkini yang harus dihadapi.

Renja Perubahan Dinas Pendidikan tahun 2025 mengacu kepada Renstra Dinas Pendidikan tahun 2024-2026 yang disusun berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 serta mengacu pada tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan dalam RPJPD Kabupaten Tangerang dan telah memuat hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, memuat permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pemdidikan dalam melaksanakan program dan kegiatan, serta telah mengakomodir usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat dengan memuat Target Kinerja, Kebijakan, Program dan Kegiatan Dinas yang disusun secara tahunan dan diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman atau acuan dalam mencapai tujuan pembangunan di bidang Pendidikan. Rencana Kinerja Perubahan (Renja) Tahun 2025 ini akan terlaksana apabila seluruh stakeholder memberikan dukungan moril maupun materil. Meskipun demikian, ketatnya rincian program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan oleh Kemendagri menyebabkan Dinas Pendidikan kurang leluasa dalam menyusun program dan kegiatan- berdasarkan potensi dan kebutuhan pelayanan sektor Pendidikan di Kabupaten Tangerang. Selain itu dibutuhkan keberanian dan invonasi yang tepat sehingga program dan kegiatan yang dilakukan mampu memberikan dampak yang luas dan signifikan terhadap kemajuan sektor Pendidikan serta meningkatkan rata-rata lama sekolah untuk masyarakat dan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan. Adanya Rencana Kinerja (Renja) ini diharapkan agar Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang serta seluruh aparat dapat melaksanakan tugas secara terarah, bertahap dan berkesinambungan dengan tetap mengadakan koordinasi dengan instansi terkait dan untuk mengantisipasi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang bersifat cepat, akurat, transparan dan adil.

Perubahan Paradigma pengelolaan pendidikan merupakan suatu keniscayaan, dimulai dari lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang. Implementasi aktualnya adalah bentuk kebijakan – kebijakan yang ditetapkan secara koordinatif dan lintas sektoral, serta memenuhi akuntabilitas publik yang tercantum dalam laporan pelaksanaan. Hal tersebut dapat terwujud, apabila eksekutif dan legislatif mempunyai Political Will dengan dukungan perangkat hukum yang mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan yang profesional, transparan, jujur dan akuntabel.

2. Kaidah Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan, adakalanya anggaran yang tersedia tidak sesuai dengan kebutuhan. Apabila kondisi ini terjadi dalam pelaksanaan pembangunan di sektor Pendidikan di Kabupaten Tangerang, maka Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang harus memprioritaskan pencapaian seluruh indikator kinerja yang mengacu kepada tujuan dan sasaran Renstra; mengerahkan seluruh potensi yang dimiliki baik SDM maupun sarana prasarana guna mendukung pencapaian indikator kinerja yang mengacu pada sasaran Renstra; mengupayakan peningkatan koordinasi dan Kerjasama antar unit kerja internal dan eksternal dalam pelaksanaan program kegiatan sehingga berjalan efektif dan mendapatkan hasil yang optimal. Implementasi Rencana Kinerja (Renja) ini membutuhkan partisipasi, peran dan komitmen dari semua komponen di lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang sehingga hasil yang dicapai akan optimal dan berkualitas selaras dengan tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.

Dalam Perubahan Renja Tahun 2025 terdapat penambahan sub kegiatan baru yaitu sebanyak 3 sub kegiatan, perlunya dilakukan penyesuaian terhadap Renja Dinas Pendidikan tahun 2025 agar dapat mengakomodir kegiatan yang alokasi anggarannya bersumber dari dana DAK terkait dengan kegiatan yang dilaksanakan, namun belum ada sub kegiatan yang mengakomodir pelaksanaan kegiatan DAK tersebut. Disamping itu juga terdapat kegiatan yang dimaksud untuk mendukung percepatan penanganan kemiskinan ekstrim melalui beasiswa dan pemenuhan fasilitas Pendidikan untuk Pendidikan non formal/masyarakat yang putus sekolah dan penanganan stunting pada jenjang Pendidikan anak usia dini (PAUD). Sub kegiatan yang tersebut di atas juga sebagai Upaya pemenuhan mutu dari Pendidikan khususnya Pendidikan non formal/masyarakat sesuai dengan amanat dari Permendikbudristek Nomor 32 tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan. Hal ini juga sejalan dengan misi dari Bupati Tangerang yaitu Meningkatkan akses mutu dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas dan sehat.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan, adakalanya anggaran yang tersedia tidak sesuai dengan kebutuhan. Apabila kondisi ini terjadi dalam pelaksanaan pembangunan di sektor Pendidikan di Kabupaten Tangerang, maka Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang harus memprioritaskan pencapaian seluruh indicator kinerja yang mengacu kepada tujuan dan sasaran Renstra; mengerahkan seluruh potensi yang

dimiliki baik SDM maupun sarana prasarana guna mendukung pencapaian indicator kinerja yang mengacu pada sasaran Renstra; mengupayakan peningkatan koordinasi dan Kerjasama antar unit kerja internal dan eksternal dalam pelaksanaan program kegiatan sehingga berjalan efektif dan mendapatkan hasil yang optimal.

3. Rencana Tindak Lanjut

Kinerja urusan Pendidikan Kabupaten Tangerang harus mengakomodir sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan juga Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, sehingga kedepannya dianggap perlu untuk memasukan beberapa indikator urusan Pendidikan sesuai dengan regulasi tersebut. Kesulitan yang dihadapi terkait dengan keberadaan data pendukung dan sumber daya manusia pada Dinas Pendidikan dalam hal ini diantaranya adalah :

a. Data Rapor Pendidikan telah tersedia namun tidak semua Satuan Pendidikan paham terhadap esensi dari Rapor Pendidikan untuk diimplementasikan sehingga dapat meningkatkan nilai rapor pada masing-masing Satuan Pendidikannya.
b. Masih terbatasnya SDM yang memiliki kemampuan dalam membaca dan mengimplementasikan pembenahan sesuai dengan rekomendasi rapor Pendidikan.
c. Dinas Pendidikan belum menetapkan target dan indikator berdasarkan hasil dari rapor Pendidikan dalam dokumen perencanaan baik Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan, sehingga perlu menjadi perhatian dan tindak lanjut perangkat daerah kedepannya agar menjadikan data dalam rapor sebagai acuan dasar penentuan target indikator perangkat daerah pada penyusunan Rencana Strategis 2025-2029 mendatang dan rencana kerja tahunan.

Meskipun demikian, keberadaan target dan indikator pada rapor Pendidikan tetap menjadi perhatian dan diimplementasikan dalam kegiatan serta sub kegiatan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang dan dilaporkan secara terpisah dari dokumen perencanaan melalui laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) setiap triwulan baik kepada pemerintah pusat maupun kepada pemerintah daerah.

Target indikator yang akan dijadikan tolak ukur kedepannya diantaranya adalah :

a. Angka Partisipasi Sekolah untuk warga negara usia 5-6 tahun PAUD
b. Angka Partisipasi Sekolah untuk warga negara usia 7-15 tahun SD dan SMP
c. Angka Partisipasi Sekolah untuk warga negara usia 7-18 tahun Kesetaraan
d. Kemampuan Literasi SD dan SMP
e. Kemampuan Numerasi SD dan SMP
f. Proporsi jumlah satuan PAUD terakreditasi minimal B
g. Proporsi guru PAUD dengan kualifikasi S1/D4
h. Iklim Inklusivitas SD dan SMP
i. Iklim Keamanan SD dan SMP

j. Iklim Kebhinekaan SD dan SMP

Rencana Kerja Perubahan Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Tahun 2025 akan dijadikan acuan dasar dalam pelaksanaan kinerja tahunan Dinas Pendidikan pada tahun berkenaan dan memerlukan dukungan dari stakeholder yang terkait agar perencanaan dalam rencana kerja ini dapat dilaksanakan dan cita-cita pencapaian tujuan Pembangunan daerah di bidang Pendidikan dapat terwujud.

9. Dinas Kesehatan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Fungsi Renja Perangkat Daerah adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dalam membangun daerah sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah memuat antara lain program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pagu indikatif serta prakiraan maju.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang Tahun 2025 secara garis besar memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Sebagai sebuah dokumen resmi, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPD) daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 akan menjadi dasar dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025, serta digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa proses penyusunan Renja Perangkat Daerah terdiri dari beberapa tahapan yaitu tahap persiapan penyusunan, penyusunan rencana kerja, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah, perumusan rencana kerja dan tahap penetapan renja perangkat daerah.

Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang merupakan salah satu perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang

urusan pemerintahan bidang kesehatan yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan bidang kesehatan di wilayah Kabupaten Tangerang.

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD) disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta mengacu pada Renstra-OPD yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD) adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Sebagai dokumen rencana tahunan Organisasi Perangkat Daerah, Renja Dinas Kesehatan mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

a. Renja OPD merupakan dokumen yang secara substansial mewujudkan dari visi, misi Rencana Pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam RPD Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026 sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD).
b. Renja merupakan acuan OPD sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program kegiatan kedalam KUA, PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan anggaran (RKA) tahun 2025.
c. Renja OPD merupakan salah satu instrument untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Organisasi Perangkat Daerah.

Dalam rangka upaya mencapai target sasaran pembangunan yang telah diamanatkan di dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026, tentunya diperlukan perencanaan-perencanaan yang matang, terpadu dan terintegrasi agar proses pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditentukan dapat berjalan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran. Sehubungan dengan hal tersebut, maka disusun Renja Dinas Kesehatan Tahun 2025 guna mencapai sasaran yang telah ditentukan di dalam RPD Kabupaten Tangerang dan sebagaimana telah dijabarkan ke dalam Renstra Dinas Kesehatan.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Pasal 118 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusatdan Pemerintah Daerah (lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran NegaraTahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembar Negara Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor25 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6323);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016

Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 187);

16. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 10);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
18. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15..5-1317 Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan;
25. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026;
26. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2025.

1.3. Maksud Dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang Tahun 2025 dimaksudkan untuk:

1. Memberikan arah dan pedoman bagi aparatur Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang dalam melaksanakan tugasnya, sehingga sasaran dan target capaian pembangunan yang dilaksanakan di dalam program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tahun 2025 dapat berjalan sesuai dengan kebijakan.
2. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana kerja pada tahun berjalan.

Tujuan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang Tahun 2025 adalah :

1. Merumuskan program, kegiatan dan pendanaan untuk 1 (satu) tahun mendatang yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang.
2. Mengoptimalkan peran dan fungsi Dinas Kesehatan di dalam pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Tangerang di bidang Kesehatan.
3. Mempermudah pengendalian, monitoring, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan rencana kegiatan dalam kurun waktu tahun 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2025 disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

Dalam penulisan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang ini disusun secara sistematika, terdiri dari 5 (lima) Bab yaitu;

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI RENJASAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2025

2.1. Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah triwulan I dan perkiraan capaian triwulan berjalan, mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Review Terhadap Renja PD Tahun 2025

Berisikan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan uraian penjelasan dari tabel program dan kegiatan.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I
TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025

Pada Triwulan I Tahun 2025, pelaksanaan program strategis dalam upaya meningkatkan status kesehatan masyarakat menunjukkan capaian yang relatif baik pada sejumlah indikator, terutama yang bersifat negatif. Angka kematian ibu, angka kematian bayi, dan prevalensi stunting tercatat lebih rendah dibandingkan target tahunan, yang berarti kondisi kesehatan masyarakat pada aspek tersebut berada pada arah yang membaik.

Angka kematian ibu dan bayi yang masih jauh di bawah target menunjukkan keberhasilan awal dalam pencegahan kematian maternal dan neonatal. Begitu pula dengan prevalensi stunting yang lebih rendah dari target, mengindikasikan penanganan masalah gizi kronis pada anak sudah mulai menunjukkan hasil. Namun, seluruh indikator ini tetap perlu dimonitor secara ketat agar tidak mengalami kenaikan pada triwulan berikutnya.

Sementara itu, capaian pada penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis masih rendah. Hal ini menandakan perlunya peningkatan kegiatan deteksi dini, pelacakan kasus, dan perluasan layanan pengobatan. Untuk indikator sumber daya kesehatan, hasil yang dicapai sudah mendekati standar yang diharapkan, menunjukkan ketersediaan dan kesiapan layanan yang cukup baik. Nilai AKIP belum tersedia karena penilaiannya dilakukan secara tahunan.

Secara umum, capaian kinerja triwulan ini menunjukkan arah yang positif, namun tetap diperlukan penguatan pelaksanaan di lapangan agar seluruh target indikator dapat tercapai secara optimal hingga akhir tahun. Berikut Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan sampai dengan Triwulan I Tahun 2025.

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target 2025	Kinerja TW 1			Pagu			Keterangan
					Target TW 1	Realisasi TW 1	%	Target	Realisasi s.d TW 1	%	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*		*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Dinas Kesehatan**	**Persen**	**100**	**25**	**25**	**25**	**Rp 1.287.122.140.792**	**Rp 311.392.580.499**	**24.19**	
		Persentase Laporan Kinerja BLUD Bidang Kesehatan	**Persen**	**100**	**25**	**25**	**25**				
1.02.01.2.01	**Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Dokumen**	**5**	**1**	**1**	**100**	**Rp 591.132.140**	**Rp 124.506.638**	**21.06**	
1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	-	-	-	Rp 218.905.740	Rp 23.970.638	10.95	Dilakukan pada triwulan selanjutnya
1.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	2	-	-	-	Rp 9.131.000	0	0.00	Dilakukan pada triwulan selanjutnya

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target 2025	Kinerja TW 1			Pagu			Keterangan
					Target TW 1	Realisasi TW 1	%	Target	Realisasi s.d TW 1	%	
1.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	2	1	1	100	Rp 23.700.000	Rp 1.790.000	7.55	
1.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	1	1	100	Rp 157.896.400	Rp 85.073.000	53.88	
1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	1	1	100	Rp 181.499.000	Rp 13.673.000	7.53	
1.02.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen dokumen adminstrasi keuangan**	**Dokumen**	**5**	**1**	**1**	**100**	**Rp 547.536.656.890**	**Rp 138.501.711.530**	**25.30**	
1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	150	150	131	87.33	Rp 547.213.356.490	Rp 138.400.256.530	25.29	
1.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1	1	100	Rp 323.300.400	Rp 101.455.000	31.38	
1.02.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen Barang Milik Daerah**	**Dokumen**	**4**	**1**	**1**	**100**	**Rp 46.402.040**	**0**	**0.00**	

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target 2025	Kinerja TW 1			Pagu			Keterangan
					Target TW 1	Realisasi TW 1	%	Target	Realisasi s.d TW 1	%	
1.02.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	1	0	0	Rp 5.489.770	0	0.00	Kegiatan sudah dilaksanakan namun belum dilakukan penyerapan. Pengajuan pencairan dilakukan di Triwulan 2
1.02.01.2.03.0004	Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	-	-	-	Rp 30.020.500	0	0.00	
1.02.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	-	-	-	Rp 10.891.770	0	0.00	
1.02.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen Pembinaan Pegawai**	**Dokumen**	**1**	**-**	**-**	**-**	**Rp 335.744.000**	**0**	**0.00**	
1.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	175	-	-	-	Rp 321.826.000	0	0.00	Pelaksanaan penyerapan anggaran dilakukan di triwulan 3
1.02.01.2.05.0005	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	3	-	-	-	Rp 13.918.000	0	0.00	Pelaksanaan penyerapan anggaran dilakukan di triwulan 2 dan 3
1.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Dokumen**	**1**	**-**	**-**	-	**Rp 5.679.902.943**	**Rp 527.707.850**	**9.29**	
1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Paket	1	-	-	-	Rp 284.714.800	Rp 164.135.050	57.65	

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target 2025	Kinerja TW 1			Pagu			Keterangan
					Target TW 1	Realisasi TW 1	%	Target	Realisasi s.d TW 1	%	
		Bangunan Kantor yang Disediakan									
1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	-	-	-	Rp 1.043.291.618	0	0.00	
1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	-	-	-	Rp 997.734.720	Rp 10.000.000	1.00	
1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	-	-	-	Rp 1.250.909.805	Rp 26.340.800	2.11	
1.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	-	-	-	Rp 121.090.000	Rp 33.253.000	27.46	
1.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	3	3	100	Rp 227.702.000	Rp 28.110.000	12.35	
1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	3	3	100	Rp 1.754.460.000	Rp 265.869.000	15.15	
1.02.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tersedianya Laporan barang milik daerah**	**Dokumen**	**1**	**-**	**-**	-	**Rp 16.237.165.040**	**Rp 1.594.689.000**	**9.82**	
1.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	7	2	2	100	Rp 2.544.407.340	Rp 259.940.000	10.22	
1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	4	1	1	100	Rp 6.415.157.900	Rp 950.550.000	14.82	

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target 2025	Kinerja TW 1			Pagu			Keterangan
					Target TW 1	Realisasi TW 1	%	Target	Realisasi s.d TW 1	%	
1.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	4	1	1	100	Rp 6.859.566.500	Rp 120.700.000	1.76	
1.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	-	-	-	Rp 418.033.300	Rp 263.499.000	63.03	
1.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah dokumen Jasa Penunjang**	**Dokumen**	**1**	**-**	**-**	-	**Rp 53.697.262.483**	**Rp 11.070.983.114**	**20.62**	
1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	3	3	100	Rp 12.390.971.596	Rp 1.819.061.214	14.68	
1.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatandan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	2	2	100	Rp 385.435.500	Rp 105.000.000	27.24	
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	3	3	100	Rp 40.920.855.387	Rp 9.146.921.900	22.35	
1.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Dokumen**	**1**	**-**	**-**	-	**Rp 9.537.866.849**	**Rp 632.029.413**	**6.63**	
1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	6	1	1	100	Rp 240.305.356	Rp 55.987.500	23.30	

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target 2025	Kinerja TW 1			Pagu			Keterangan
					Target TW 1	Realisasi TW 1	%	Target	Realisasi s.d TW 1	%	
1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	36	9	9	100	Rp 2.088.598.668	Rp 365.024.922	17.48	
1.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	15	-	-	-	Rp 20.000.000	0	0.00	
1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	11	3	3	100	Rp 1.780.555.200	Rp 168.481.400	9.46	
1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	6	1	1	100	Rp 5.408.407.625	Rp 42.535.591	0.79	
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Jumlah Unit Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Unit**	**48**	**48**	**48**	**100**	**Rp 653.460.008.407**	**Rp 158.940.952.954**	**24.32**	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Penunjang BLUD yang terlayani	Unit	48	48	48	100	Rp 653.460.008.407	Rp 158.940.952.954	24.32	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**							**Rp 569.337.890.121**	**Rp 77.265.854.973**	**13.57**	
	1	**Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan**	**Rasio**	**0.10**	**0.10**	**0.089**	**89**				
	2	**Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang Terakreditasi**	**Persen**	**92.59**	**89.28**	**89.28**	**100**				
	3	**Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil**	**Persen**	**100**	**25**	**25**	**100**				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target 2025	Kinerja TW 1			Pagu			Keterangan
					Target TW 1	Realisasi TW 1	%	Target	Realisasi s.d TW 1	%	
	4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Persen	100	25	25	100				
	5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100	25	25	100				
	6	Presentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Persen	100	25	25	100				
	7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100	25	25	100				
	8	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	100	25	25	100				Jumlah skrining yang tinggi memerlukan dukungan lintas program dan lintas sektor dalam pelaksanaan kegiatan maupun penginputan data ke dalam aplikasi. Sebagai tindak lanjut diperlukan Penguatan kerjasama lintas program/sektor serta penguatan pelaporan program dalam aplikasi sehat indonesiaku
	9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan	Persen	100	25	25	100				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target 2025	Kinerja TW 1			Pagu			Keterangan
					Target TW 1	Realisasi TW 1	%	Target	Realisasi s.d TW 1	%	
		skrining kesehatan sesuai standar									
	10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100	25	25	100				Capaian Penderita hipertensi yang terkendali dibawah 70%. Perlu ditindak lanjuti dengan Penguatan pelaporan program dalam aplikasi sehat indonesiaku
	11	Persentase penderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100	25	25	100				Capaian Penderita diabetes melitus yang terkendali dibawah 70%. Perlu tindak lanjut Penguatan pelaporan program dalam aplikasi sehat indonesiaku
	12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Persen	100	25	25	100				Adanya perubahan pada aplikasi SIMKESWA sehingga menjadi kendala pada saat penginputan capaian ODGJ Berat. Perlu tindak lanjut Penguatan pelaporan program dalam aplikasi SIMKESWA
	13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Persen	100	25	25	100				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target 2025	Kinerja TW 1			Pagu			Keterangan
					Target TW 1	Realisasi TW 1	%	Target	Realisasi s.d TW 1	%	
	14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Persen	100	25	0.84375	3.38				- Pergantian petugas - Lokasi Hotspot yang berubah - Pemahaman pengetahuan masyarakat tentang penyakit HIV. Tindak lanjut dengan 1. Melakukan penguatan kapasitas bagi petugas baru 2. Penguatan koordinasi dengan petugas penjangkau (LSM) untuk informasi perubahan lokasi hotspot 3. Melanjutkan rencana kegiatan di TW II 4. Validasi data rutin 5. Monitoring dan evaluasi capaian Layanan yang berkelanjutan
	15	Persentase Balita Wasting	Persen	100	25	25	100				
	16	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Puskesmas	Persen	84.90	84.50	84.50	100			]	

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target 2025	Kinerja TW 1			Pagu			Keterangan
					Target TW 1	Realisasi TW 1	%	Target	Realisasi s.d TW 1	%	
	17	**Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan Obat dan Vaksin Essensial**	**Persen**	**90.00**	**20**	**20**	**100**				
	18	**Persentase alat kesehatan memenuhi standar**	**Persen**	**82.00**	**20**	**20**	**100**				
1.02.02.2.01	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Unit**	**214**	**55**	**55**	**100**	**Rp 295.578.587.896**	**Rp 25.497.962.427**	**8.63**	
1.02.02.2.01.0001	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah sakit baru yang memenuhi Rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000	Unit	1	1	0	0	Rp 30.196.200.000	0	0	
1.02.02.2.01.0002	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	Unit	1	-	-	-	Rp 141.246.000	0	0.00	
1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana Prasarana Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Unit	11	3	3	100	Rp 24.835.835.770	Rp 1.670.151.680	6.72	
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	20	5	5	100	Rp 95.751.967.541	Rp 4.123.995.222	4.31	
1.02.02.2.01.0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan fasilitas	Unit	1100	1100	1115	101	Rp 1.997.383.000	Rp 708.749.000	35.48	

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target 2025	Kinerja TW 1			Pagu			Keterangan
					Target TW 1	Realisasi TW 1	%	Target	Realisasi s.d TW 1	%	
		Kesehatan Regional / Regional Maintenance Centre									
1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Unit	140	35	0	0	Rp 4.220.474.000	Rp 1.196.185.000	28.34	
1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat Bahan Habis Pakai Bahan Medis Habis Pakai Vaksin Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat Bahan Habis Pakai Bahan Medis Habis Pakai Vaksin Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Paket	4	1	1	100	Rp 138.056.676.585	Rp 17.734.381.525	12.85	
1.02.02.2.01.0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	Keluarga	58150	14538	14500	99.74	Rp 30.490.000	Rp 20.500.000	67.24	Petugas pemegang program belum semuanya paham untuk laporan dan aplikasi “Keluarga Sehat”. Solusi Tim primer membuat pertemuan tentang penggunaan aplikasi “Keluarga Sehat”
1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan Obat Bahan Habis Pakai Bahan Medis Habis Pakai Vaksin Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan Obat Bahan Habis Pakai Bahan Medis Habis Pakai Vaksin Makanan ke Fasilitas Kesehatan	Paket	4	4	4	100	Rp 348.315.000	Rp 45.000.000	12.92	
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan**	**Jumlah Ketersediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP**	**Layanan Kesehatan**	**36**	**36**	**36**	**100**	**Rp 272.625.136.225**	**Rp 51.364.822.546**	**18.84**	

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target 2025	Kinerja TW 1			Pagu			Keterangan
					Target TW 1	Realisasi TW 1	%	Target	Realisasi s.d TW 1	%	
	Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**									
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	61571	15392	15392	100	Rp 3.589.176.796	Rp 125.245.000	3.49	
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	58772	14693	14693	100	Rp 105.989.000	Rp 77.551.000	73.17	
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	55500	13875	13875	100	Rp 116.452.000	Rp 41.990.000	36.06	
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	284085	71021	71021	100	Rp 112.370.000	Rp 1.950.000	1.74	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	556948	139237	139237	100	Rp 1.448.440.005	Rp 1.490.000	0.10	
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	2246044	561511	561511	100	Rp 144.443.200	Rp 95.050.000	65.80	
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	229410	57352	57352	100	Rp 1.535.092.000	Rp 291.596.000	19.00	
1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan	Orang	729628	182407	182407	100	Rp 127.478.400	Rp 109.790.000	86.12	

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target 2025	Kinerja TW 1			Pagu			Keterangan
					Target TW 1	Realisasi TW 1	%	Target	Realisasi s.d TW 1	%	
		Kesehatan Sesuai Standar									
1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	43632	10908	10908	100	Rp 377.519.000	Rp 51.809.000	13.72	
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Orang	4219	1058	1058	100	Rp 433.337.772	Rp 109.762.000	25.33	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	48578	9716	9716	100	Rp 566.121.766	Rp 32.870.000	5.81	1. Belum semua klinik aktif dalam pelaporan Tuberkulosis 2. Petugas epncatatan dan pelaporan di faskes yang sering berganti. Tindak lanjut 1. Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2025. 2. Monitoring pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Pelayanan

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target 2025	Kinerja TW 1			Pagu			Keterangan
					Target TW 1	Realisasi TW 1	%	Target	Realisasi s.d TW 1	%	
											Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis pada Triwulan berikutnya 3. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis pada Triwulan berikutnya 4. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	79559	15912	15715	98.76	Rp 1.122.312.000	Rp 530.604.000	47.28	
1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Dokumen	1	-	-	-	Rp 79.985.000	0	0.00	

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target 2025	Kinerja TW 1			Pagu			Keterangan
					Target TW 1	Realisasi TW 1	%	Target	Realisasi s.d TW 1	%	
1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	Dokumen	1	-	-	-	Rp 151.947.000	Rp 22.500.000	14.81	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	4	1	1	100	Rp 24.447.649.981	Rp 568.858.350	2.33	Dilaksanakan pada triwulan 2
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	1	-	-	-	Rp 125.925.337	Rp 4.015.000	3.19	Dilaksanakan pada triwulan 2
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	2	-	-	-	Rp 652.070.806	Rp 36.613.964	5.62	Ada beda harga per kg limbah medis di SIPD dengan jasa pengangkutan pihak ketiga. Solusi koordinasi dengan penyedia dan meningkatkan jumlah timbulan limbah medis
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	1	-	-	-	Rp 369.292.000	0	0.00	
1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional Akupuntur Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional Akupuntur Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Dokumen	12	3	3	100	Rp 35.337.000	Rp 11.685.000	33.07	Sebagian pemegang program kestrad masih ada yang tidak memahami pelaporan.Solusi Melakukan sosialisasi

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target 2025	Kinerja TW 1			Pagu			Keterangan
					Target TW 1	Realisasi TW 1	%	Target	Realisasi s.d TW 1	%	
											mengenai pelaporan program kestrad.
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	1	-	-	-	Rp 976.740.856	Rp 26.700.000	2.73	Karena program kestrad masuk ke UKM Pengembangan sehingga banyak puskesmas yang tidak menganggarkan kegiatan pembinaan program kestrad.
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang	533283	133320	133320	100	Rp 426.689.944	0	0.00	Adanya perubahan pada aplikasi SIMKESWA sehingga menjadi kendala pada saat penginputan capaian skrining ODMK. Penguatan pelaporan program dalam aplikasi SIMKESWA
1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang	480	120	120	100	Rp 70.729.000	Rp 34.729.000	49.10	Koordinasi Lintas program dan sektor belum berjalan optimal. penguatan jejaring antara pemegang program dengan lintas sektor terkait seperti OPD Kecamatan,Dinsos, BNK dan Kepolisian

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target 2025	Kinerja TW 1			Pagu			Keterangan
					Target TW 1	Realisasi TW 1	%	Target	Realisasi s.d TW 1	%	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	2	-	-	-	Rp 4.025.325.359	Rp 26.196.000	0.65	1. Pergantian petugas PJ yang baru. 2. Kurangnya pemahaman pengetahuan masyarakat tentang Penyakit Menular. Melakukan penguatan kapasitas bagi petugas baru Melanjutkan rencana kegiatan di TW II Monitoring dan evaluasi capaian Layanan yang berkelanjutan
1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	24	6	6	100	Rp 209.035.239.172	Rp 47.561.471.478	22.75	
1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	Paket	1	-	-	-	Rp 564.353.000	0	0.00	Pelaksanaan dilakukan pada triwulan II
1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Dokumen	1	-	-	-	Rp 191.971.000	Rp 14.426.000	7.51	
1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Dokumen	4	4	4	100	Rp 9.101.767.000	Rp 1.026.457.800	11.28	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	44	44	44	100	Rp 6.588.813.879	Rp	0.00	

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target 2025	Kinerja TW 1			Pagu			Keterangan
					Target TW 1	Realisasi TW 1	%	Target	Realisasi s.d TW 1	%	
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dokumen	14	3	3	100	Rp 399.732.184	Rp 25.715.000	6.43	Masih ada Klinik pratama dan TPMD yang tidak menghadiri acara koordinasi dan persiapan terkait pelaporan program prioritas (TB, Hipertensi dan DM). Tindak lanjut Melakuan pembinaan terhadap klinik pratama dan TPMD yang belum melakukan pelaporan terkait program prioritas (TB, Hipertensi dan DM).
1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/ Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	Unit	48	48	48	100	Rp 414.726.000	Rp 26.910.000	6.49	Sebagian puskesmas dan sebagaian PJ program Dinas masih belum paham tentang perhitungan dalam validasi PKP Puskesmas dan masih banyaknya klinik swasta yang tidak patuh/belum melaporkan rekomendasi PPS di tw 3 dan 4. Berkoordinasi dengan PJ program

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target 2025	Kinerja TW 1			Pagu			Keterangan
					Target TW 1	Realisasi TW 1	%	Target	Realisasi s.d TW 1	%	
											dan PJ pelaporan PKP Puskesmas tentang cara perhitungan kinerja PKP, dan menginatkan ulang kepada klinik swasta untuk melakukan proses pelaksanaan pada Aplikasi DFO secara berkelanjutan.
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Laporan	1	-	-	-	Rp 8.334.000	Rp 4.734.000	56.80	
1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Dokumen	1	-	-	-	Rp 124.032.000	Rp 28.405.000	22.90	
1.02.02.2.02.0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Unit	1	-	-	-	Rp 1.524.196.400	Rp 414.002.954	27.16	Ruang intensif di rumah sakit full. Terus berkoordinasi dengan Rumah Sakit yang ada baik itu swasta mapun pemerintah
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	10202	2040	2040	100	Rp 65.867.000	Rp 10.200.000	15.49	1. Belum semua klinik aktif dalam pelaporan tuberkulosis. 2. Petugas pencatatan dan

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target 2025	Kinerja TW 1			Pagu			Keterangan
					Target TW 1	Realisasi TW 1	%	Target	Realisasi s.d TW 1	%	
											pelaporan di faskes yang sering berganti. Solusi 1. Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Tuberkulosis sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2025. 2. Monitoring pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Tuberkulosis pada Triwulan berikutnya 3. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Tuberkulosis pada Triwulan berikutnya 4. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target 2025	Kinerja TW 1			Pagu			Keterangan
					Target TW 1	Realisasi TW 1	%	Target	Realisasi s.d TW 1	%	
											Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Tuberkulosis
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	464	93	93	100	Rp 15.356.000	Rp 3.796.000	24.72	1. Pergantian petugas 2. Infeksi Oportunistik pada ODHIV 3. Kesadaran dan kepatuhan pasien ODHIV. Solusi 1. Melakukan penguatan kapasitas bagi petugas baru 2. Refreshing layanan PDP baru 3. Melanjutkan rencana kegiatan di TW II 4. Validasi data orang dengan risiko terinfeksi HIV 5. Monitoring dan evaluasi capaian Layanan yang berkelanjutan
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	Orang	22	5	5	100	Rp 31.415.780	0	0.00	Pergantian petugas Kesadaran dan kepatuhan pasien malaria. Tindak lanjut 1. Menguatkan jejaring Rumah Sakit terkait

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target 2025	Kinerja TW 1			Pagu			Keterangan
					Target TW 1	Realisasi TW 1	%	Target	Realisasi s.d TW 1	%	
											pelaporan kasus malaria positif dan pelaporan rutin zero report kasus malaria dari Rumah Sakit dan Puskesmas secara rutin. 2. Melakukan Penyelidikan Epidemiologi kasus malaria positif 3. Melakukan survey kontak dari kasus positif malaria 4. Mengupayakan inovasi dalam program Malaria yaitu inovasi SIMANIS (Skrining Malaria bagi pendatang dari daerah Endemis) 5. Mempersiapkan logistik program malaria 6. Memberikan dan mengupayakan pemberian pengobatan Malaria sesuai standar bagi setiap kasus Malaria Mengadakan kegiatan pertemuan

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target 2025	Kinerja TW 1			Pagu			Keterangan
					Target TW 1	Realisasi TW 1	%	Target	Realisasi s.d TW 1	%	
											penguatan kapasitas petugas Rumah Sakit dan Puskesmas terkait tata laksana kasus Malaria positif dan pengobatan Malaria sesuai standar.
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Dokumen	3	3	3	100	Rp 904.005.022	0	0.000	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Dokumen	44	11	11	100	Rp 268.003.566	Rp 47.700.000	17.80	
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Dokumen	3	3	3	100	Rp 181.200.000	0	0.00	
1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	Dokumen	4	4	4	100	Rp 2.165.700.000	0	0.00	
1.02.02.2.03	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**	**Jumlah Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**	**Dokumen**	**1**	-	-	-	**Rp 972.996.000**	**Rp 375.566.000**	**38.60**	
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Dokumen	4	1	1	100	Rp 972.996.000	Rp 375.566.000	38.60	Karena adanya efisiensi anggaran saat berproses di e-katalog
1.02.02.2.04	**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki Izin Operasional**	**Unit**	**28**	**28**	**28**	**100**	**Rp 161.170.000**	**Rp 27.504.000**	**17.07**	

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target 2025	Kinerja TW 1			Pagu			Keterangan
					Target TW 1	Realisasi TW 1	%	Target	Realisasi s.d TW 1	%	
1.02.02.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	Unit	28	7	7	100	Rp 104.529.000	Rp 22.680.000	21.70	Karena adanya efisiensi anggaran.Kagiatan dilakukan secara daring.
1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	Unit	48	48	48	100	Rp 56.641.000	Rp 4.824.000	8.52	Masih banyak Klinik Swasta yang tidak patuh / belum melaporkan INM,IKP tepat waktu. dan untuk pertemuan monitoring dan evaluasi indikator mutu FKTP hanya dapat diikuti oleh 60 perwakilan klinik saja.. Solusi Mengingatkan ulang kepada klinik swasta dan puskesmas untuk melaporkan INM, IKP setiap bulannya dan dalam memberikan fasilitas zoom untuk klinik yang tidak diundang secara offline.
1.02.03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**							**Rp 9.891.893.000**	**Rp 2.271.230.000**	**22.96**	

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target 2025	Kinerja TW 1			Pagu			Keterangan
					Target TW 1	Realisasi TW 1	%	Target	Realisasi s.d TW 1	%	
		Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	**Persen**	**100**	**25**	**25**	**100**				
		Persentase Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	**Persen**	**100**	**25**	**25**	**100**				
1.02.03.2.01	**Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Tenaga Kesehatan yang Mendapatkan Rekomendasi Izin Praktik di Wilayah Kabupaten Tangerang**	**Orang**	**190**	**45**	**45**	**100**	**Rp 41.592.000**	**Rp 8.100.000**	**19.74**	
1.02.03.2.01.0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Dokumen	1	1	1	100	Rp 41.592.000	Rp 8.100.000	19.74	Kegiatan akan dilaksanakan di pergeseran
1.02.03.2.02	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	**Jumlah terpenuhinya kebutuhan sumber daya manusia kesehatan**	**Orang**	**219**	**219**	**219**	**100**	**Rp 8.248.346.000**	**Rp 2.263.130.000**	**27.44**	
1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Orang	219	219	185	84.47	Rp 8.174.082.000	Rp 2.230.380.000	27.29	Beberapa tenaga TKWT lulus seleksi PPPK dan CPNS

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target 2025	Kinerja TW 1			Pagu			Keterangan
					Target TW 1	Realisasi TW 1	%	Target	Realisasi s.d TW 1	%	
1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dokumen	1	-	-	-	Rp 74.264.000	Rp 32.750.000	44.10	Petugas laboratorium puskesmas jarang mendapatkan pelatihan yang diadakan secara mandiri oleh puskesmas. Tindak lanjut Melakukan pembinaan dan monitoring kepada petugas laboratorium puskesmas
1.02.03.2.03	**Pengembangan Mutu dan peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**	**Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang dikembangkan dan ditingkatkan Kompetensinya**	**Orang**	**100**	**25**	**25**	**100**	**Rp 1.601.955.000**	**0**	**0.00**	
1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	Orang	100	25	25	100	Rp 1.601.955.000	0	0.00	Pelaksanaan kegiatan dilakukan dimulai pada triwulan 2, 3 dan 4 sesuai dengan perencanaan dan anggaran kas yang sudah dibuat
1.02.04	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**							**Rp 912.850.200**	**Rp 166.155.200**	**18.20**	
		Persentase P-IRT yang sesuai standar	**Persen**	**100**	**25**	**22**	**88**				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target 2025	Kinerja TW 1			Pagu			Keterangan
					Target TW 1	Realisasi TW 1	%	Target	Realisasi s.d TW 1	%	
		Persentase sarana kefarmasian yang sesuai standar	**Persen**	**100**	**25**	**16**	**64**				
		Persentase TPM yang memenuhi syarat berdasarkan Inspeksi Kesehatan Lingkungan	**Persen**	**100**	**25**	**25**	**100**				
1.02.04.2.01	**Pemberian Izin Apotek Toko Obat Toko Alat Kesehatan dan Optikal Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)**	**Jumlah Pemeriksaan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang memiliki izin/memenuhi standar**	**Unit**	**224**	**56**	**40**	**71.43**	**Rp 112.385.250**	**Rp 23.121.250**	**20.57**	
1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek Toko Obat Toko Alat Kesehatan dan Optikal Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek Toko Obat Toko Alat Kesehatan dan Optikal Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Dokumen	4	1	1	100	Rp 112.385.250	Rp 23.121.250	20.57	
1.02.04.2.02	**Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga**	**Jumlah Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga**	**Unit**	**16**	**4**	**4**	**100**	**Rp 11.603.000**	**Rp 2.670.000**	**23.01**	
1.02.04.2.02.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat	Dokumen	2	-	-	-	Rp 11.603.000	Rp 2.670.000	23.01	Dilaksanakan pada triwulan 2

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target 2025	Kinerja TW 1			Pagu			Keterangan
					Target TW 1	Realisasi TW 1	%	Target	Realisasi s.d TW 1	%	
	Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga									
1.02.04.2.03	**Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga**	**Jumlah Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga**	**Unit**	**250**	**60**	**60**	**100**	**Rp 396.756.000**	**Rp 105.543.750**	**26.60**	
1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Dokumen	3	1	1	100	Rp 396.756.000	Rp 105.543.750	26.60	
1.02.04.2.04	**Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)**	**Jumlah Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)**	**Sertifikat**	**50**	**10**	**9**	**90**	**Rp 82.466.200**	**Rp 23.570.200**	**28.58**	**Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi terkendala lambatnya pemenuhan persyaratan administrasi dan perbaikan temuan dilapangan. Tindak lanjut Sosialisasi**

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target 2025	Kinerja TW 1			Pagu			Keterangan
					Target TW 1	Realisasi TW 1	%	Target	Realisasi s.d TW 1	%	
											persayaratan administrasi penerbitan sertifikat laik higiene sanitasi (SLHS)
1.02.04.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Dokumen	1	-	-	-	Rp 82.466.200	Rp 23.570.200	28.58	Kurangnya pemahaman penanggung jawab Tempat Pengelola Pangan (TPP) mengenai sanitasi TPP, peningkatan kapasitas penjamah makanan. Solusi Pembinaan dan peaksanaan pelatihan higiene sanitasi makanan bagi penjamah makanan di TPP
1.02.04.2.06	**Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga**	**Jumlah Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga**	**Unit**	**75**	**18**	**18**	**100**	**Rp 309.639.750**	**Rp 11.250.000**	**3.63**	
1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	Unit	2	-	-	-	Rp 309.639.750	Rp 11.250.000	3.63	

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target 2025	Kinerja TW 1			Pagu			Keterangan
					Target TW 1	Realisasi TW 1	%	Target	Realisasi s.d TW 1	%	
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**							**Rp 9.194.593.917**	**Rp 1.521.024.000**	**16.54**	
		Persentase Organisasi Masyarakat kemitraan bidang Kesehatan	**Persen**	**100**	**25**	**25**	**100**				
		Persentase Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Tatanan Rumah Tangga	**Persen**	**100**	**25**	**25**	**100**				
		Persentase Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Tatanan institusi pendidikan	**Persen**	**100**	**25**	**25**	**100**				
		Persentase Posyandu yang berada pada Strata Purnama Mandiri	**Persen**	**100**	**25**	**25**	**100**				
1.02.05.2.01	**Advokasi Pemberdayaan Kemitraan Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Bidang Kesehatan**	**Unit**	**16**	**4**	**4**	**100**	**Rp 8.401.159.800**	**Rp 1.457.750.000**	**17.35**	
1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan Advokasi Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan Advokasi Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dokumen	3	-	-	-	Rp 8.401.159.800	Rp 1.457.750.000	17.35	
1.02.05.2.02	**Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Unit/Institusi Pendidikan**	**330**	**82**	**82**	**100**	**Rp 412.374.000**	**Rp 34.864.000**	**8.45**	

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target 2025	Kinerja TW 1			Pagu			Keterangan
					Target TW 1	Realisasi TW 1	%	Target	Realisasi s.d TW 1	%	
1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Dokumen	2	-	-	-	Rp 286.446.000	Rp 34.864.000	12.17	
1.02.05.2.02.0002	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Sersih dan Sehat	Keluarga	40343	10085	10952	108.60	Rp 125.928.000	0	0.00	
1.02.05.2.03	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Unit**	**1675**	**418**	**418**	**100**	**Rp 381.060.117**	**Rp 28.410.000**	**7.46**	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dokumen	2	-	-	-	Rp 381.060.117	Rp 28.410.000	7.46	

Pada Triwulan I Tahun Anggaran 2025, Dinas Kesehatan telah melaksanakan kegiatan yang mengacu pada program-program prioritas daerah di bidang kesehatan. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan ini dilakukan untuk mengetahui tingkat pencapaian realisasi anggaran maupun capaian kinerja terhadap indikator yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil evaluasi, secara umum pelaksanaan kegiatan pada Triwulan I menunjukan kinerja yang cukup baik, baik dari sisi realisasi anggaran maupun dari sisi capaian output kegiatan. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja program dan kegiatan diatas didapatkan bahwa :

A. Analisis Keberhasilan

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini bertujuan mendukung fungsi administratif pemerintahan, termasuk pelaporan dan penguatan tata kelola BLUD. Hingga triwulan I, realisasi anggaran mencapai Rp 311.392.580.499 atau 24,19% dari total pagu. Capaian kinerja menunjukkan keberhasilan 100% pada semua indikator.

2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Sebagai program strategis dengan pagu terbesar (Rp 569.337.890.121), capaian kinerja telah menunjukkan hasil optimal, dengan hampir seluruh indikator mencapai 100%. Sementara itu, realisasi anggaran di angka 13,57%, setara Rp 77.265.854.973.

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Program ini difokuskan pada peningkatan kompetensi tenaga kesehatan melalui pembinaan dan pelatihan. Dari total anggaran sebesar Rp 9.891.893.000, telah terealisasi Rp 2.271.230.000 atau 22,96%. Kinerja indikator telah mencapai 100%, mencerminkan bahwa pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai rencana.

4. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman

Program ini mendukung mutu pengawasan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan pengolahan pangan melalui sertifikasi dan pemantauan. Realisasi anggaran mencapai Rp166.155.200 atau 18,20% dari total Rp912.850.200. Seluruh indikator tercapai 100% kecuali satu indikator yaitu capaian P-IRT yang masih di angka 88%. Meskipun kinerja cukup baik, penguatan koordinasi lintas sektor diperlukan untuk memastikan seluruh target standar dapat tercapai dalam triwulan berikutnya.

5. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Program ini bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat melalui PHBS, kemitraan organisasi, dan pemberdayaan institusi. Dari pagu **Rp8.946.300.000**, realisasi anggaran baru **Rp1.521.024.000** atau **16.54%**. Seluruh indikator tercapai 100%, menunjukkan efektivitas pendekatan berbasis masyarakat.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap lima program prioritas di bidang kesehatan, dapat disimpulkan bahwa rata-rata pelaksanaan kegiatan telah berjalan sesuai dengan rencana, ditunjukkan dengan capaian indikator kinerja yang sebagian besar mencapai 100%. Meskipun realisasi anggaran pada triwulan I masih tergolong rendah, hal ini sejalan dengan pola penyerapan yang umumnya meningkat pada triwulan berikutnya. Oleh

karena itu, perlu upaya percepatan dalam pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran pada triwulan II agar target kinerja dan keuangan dapat tercapai secara seimbang dan optimal.

B. Analisis Kegagalan

1. Capaian Program Gizi Masih Rendah

Beberapa indikator dalam program gizi menunjukkan capaian yang belum optimal, di antaranya:

a. Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Lokal masih rendah.
b. Cakupan MP-ASI belum terintegrasi dalam sistem pelaporan gizi terpadu.
c. Cakupan balita dengan berat badan naik (N/D) masih rendah.
d. Capaian Inisiasi Menyusu Dini (IMD) masih kosong.

2. Kelemahan Pelaksanaan di Tingkat Puskesmas

Sejumlah permasalahan operasional di tingkat Puskesmas turut menghambat kelancaran program, antara lain:

a. Beberapa Puskesmas tidak dapat menghadirkan pemegang program kesehatan tradisional (kestrad) pada saat pertemuan.
b. Sering terjadi pergantian petugas pemegang program PISPK, menghambat kesinambungan program.
c. Petugas laboratorium di banyak Puskesmas belum mendapatkan pelatihan yang memadai.
d. Klinik pratama dan TPMD masih belum optimal dalam mendeteksi, menangani, serta melakukan penginputan data program prioritas (TB, hipertensi, DM) ke dalam aplikasi ASIK.

3. Permasalahan Teknis dan Sumber Daya

Berbagai tantangan teknis dan keterbatasan sumber daya juga menjadi hambatan signifikan, yaitu:

a. Penganggaran BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) untuk pelayanan PTM masih mengandalkan DAK karena keterbatasan anggaran di tingkat Puskesmas.
b. Sarana laboratorium untuk skrining PTM masih belum lengkap, misalnya alat kimia analyser otomatis, EKG, dan hematologi analyser, serta sebagian alat yang ada dalam kondisi rusak (berdasarkan data aplikasi ASPAK).
c. Minimnya tenaga pelaksana program primer menyebabkan beban kerja berlebihan pada penanggung jawab PTM.
d. Tata laksana pemberian obat belum sesuai kebutuhan pasien, sehingga pengobatan untuk penderita DM dan hipertensi belum optimal — ditunjukkan dengan capaian kendali DM/Hipertensi yang masih di bawah 70%.
e. Kolaborasi dengan lintas sektor untuk program kesehatan jiwa (keswa) dan NAPZA belum optimal, khususnya dengan Dinsos, kecamatan, dan kepolisian.
f. Aplikasi SIMKESWA masih mengalami kendala dalam penginputan capaian indikator ODGJ berat maupun skrining ODMK.

g. Pelaporan rujukan IPWL belum optimal karena tidak tersedia fitur pelaporan yang selaras di aplikasi.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja dilakukan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masingmasing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan, pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator outcome atau minimal output dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang menetapkan Indikator Kinerja yang merupakan ukuran keberhasilan baik kuantitatif maupun kualitatif atau menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran strategi yang ditetapkan.

Pencapaian terhadap Kinerja Pelayanan sampai dengan triwulan I Tahun 2025 tersebut dapat ditabulasikan menjadi sebagai berikut pada Tabel 2.2. :

Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Kunci Urusan Kesehatan	Triwulan I Tahun 2025		
		Target	Realisasi	%
1	Rasio daya tampung rumah sakit rujukan	0,1	0,089	89%
2	Persentase RS rujukan tingkat kab/kota yang terakreditasi	92,59	89,28	96%
3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100%	31,19%	31%
4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100%	36,67%	37%
5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100%	36,60%	37%
6	Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100%	31,84%	32%
7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	33,94%	34%
8	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	67,48%	67%
9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	38,85%	39%
10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	38,75%	39%
11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	37,50%	38%
12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100%	40,06%	40%
13	Persentase orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan TBC sesuai standar	100%	30,68%	31%
14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100%	30,99%	31%

Pada Triwulan I Tahun 2025, capaian realisasi terhadap indikator kinerja kunci urusan kesehatan menunjukkan variasi performa, dengan sebagian indikator mendekati target, sementara sebagian besar lainnya masih jauh dari target yang ditetapkan. Hal ini mencerminkan bahwa pelaksanaan program kesehatan masih berada pada fase awal pelaksanaan dan membutuhkan percepatan implementasi di triwulan berikutnya. Secara umum, indikator struktural dan kelembagaan seperti :

1. Rasio daya tampung rumah sakit rujukan mencapai 89% dari target, menunjukkan kapasitas layanan rujukan yang relatif memadai.
2. Persentase rumah sakit rujukan kabupaten/kota yang terakreditasi mencapai 96% dari target, mencerminkan tingginya komitmen terhadap mutu layanan kesehatan.

Namun, untuk indikator pelayanan langsung kepada masyarakat seperti:

1. Pelayanan ibu hamil, persalinan, bayi baru lahir, balita, usia sekolah, usia produktif, lansia, serta penderita penyakit prioritas (hipertensi, diabetes, TBC, HIV, dan ODGJ), realisasi rata-rata baru berada pada kisaran 30–40% dari target tahunan.

Jika dibandingkan dengan target triwulanan (25% dari target tahunan), maka sebenarnya sebagian indikator telah melampaui target triwulan, khususnya pada:

2. Skrining kesehatan usia 15–59 tahun (67%)
3. Pelayanan ODGJ berat (40%)
4. Pelayanan lansia dan penyakit kronis (hipertensi, DM) (sekitar 38–39%)

Namun, beberapa indikator lainnya seperti:

1. Pelayanan TBC, HIV, dan anak usia sekolah, meskipun sudah melampaui 30%, masih menunjukkan kesenjangan signifikan terhadap capaian ideal, mengingat tantangan akses, stigma, dan pencatatan yang belum optimal.

Meskipun mayoritas capaian belum mencapai separuh dari target tahunan, jika ditinjau berdasarkan proporsi triwulanan (sekitar 25%), maka lebih dari separuh indikator sebenarnya sudah berada di atas target triwulanan. Ini menunjukkan bahwa kinerja program di awal tahun masih berada dalam jalur yang cukup positif, namun tetap memerlukan:

- Percepatan program di Triwulan II
- Penguatan layanan berbasis komunitas
- Optimalisasi sistem pencatatan dan pelaporan serta
- Koordinasi lintas sektor dan lintas program, khususnya dalam pelayanan KIA, PTM, dan penyakit menular.

2.3. Review Terhadap Renja Perangkat Daerah Tahun 2025

Bedasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pada Rencana Kerja tahun 2025 sampai dengan pertengahan bulan Maret tahun 2025

dan hasil analisa kebutuhan, ada beberapa hal yang menjadi catatan penting yaitu:

1. Ada kegiatan yang mengalami pergeseran pagu pada kode rekening belanja, karena:
    a. Sisa lebih hasil kontrak;
    b. Setelah pelaksanaan kegiatan, ternyata dibutuhkan tambahan anggaran. Sehingga sisa lebih hasil kontrak digeser ke kode rekening belanja pada kegiatan yang lain.
2. Setelah dilakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan selama triwulan I (januari s/d Maret), beberapa kegiatan membutuhkan penambahan anggaran, pengurangan anggaran dan perubahan capaian output/hasil kegiatan.
3. Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja program dan sasaran, dibutuhkan penambahan sub kegiatan baru untuk mendukung capaian kinerja Dinas kesehatan dan pelaksanaan tugas pokok fungsi, dengan pendanaan kegiatan baru diambilkan dari hasil pergeseran sisa kontrak, usulan penambahan anggaran dan potensi SILPA kegiatan yang telah berjalan.
4. Bedasarkan hasil analisa kebutuhan, pagu indikatif belanja langsung Dinas Kesehatan pada perubahan Renja tahun 2025 mengalami perubahan pagu anggaran sebesar Rp251.365.563.172,-.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Tahun 2025 mengalami sejumlah perubahan strategis yang didasarkan pada dinamika kebutuhan pembangunan daerah, hasil evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya, serta penyesuaian terhadap arah kebijakan nasional dan daerah dalam sektor kesehatan. Perubahan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan tetap relevan, efektif, dan responsif terhadap tantangan serta kebutuhan masyarakat.

Beberapa faktor utama yang melatarbelakangi perubahan Renja Tahun 2025 antara lain:

1. Penyesuaian terhadap Kebijakan Nasional dan Daerah
   Dalam rangka mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan, serta menindaklanjuti prioritas nasional seperti penguatan transformasi layanan kesehatan, Renja 2025 disesuaikan untuk mendukung pencapaian target-target tersebut, khususnya dalam hal peningkatan akses dan mutu layanan kesehatan dasar.
2. Evaluasi Kinerja sampai dengan Triwulan I Tahun 2025
   Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja trwiulan I Tahun 2025, beberapa program dan kegiatan mengalami hambatan baik dalam hal pelaksanaan teknis, serapan anggaran, maupun capaian indikator kinerja. Oleh karena itu, dilakukan penyesuaian target dan strategi pelaksanaan agar lebih realistis dan terukur.
3. Perubahan Alokasi Anggaran

   Terjadi perubahan dalam pagu anggaran tahun 2025 yang berdampak langsung terhadap prioritas pembiayaan kegiatan. Dalam Renja yang telah diperbarui, difokuskan pada program-program prioritas yang memberikan dampak langsung terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat, seperti penguatan layanan Puskesmas, penanggulangan penyakit menular dan tidak menular, serta peningkatan gizi masyarakat.

4. Tanggap terhadap Isu dan Krisis Kesehatan Masyarakat
   Dalam menghadapi potensi ancaman penyakit menular baru, dampak perubahan iklim terhadap kesehatan, serta upaya pemulihan pasca pandemi, Renja 2025 mengakomodasi program dan kegiatan yang bersifat adaptif, seperti peningkatan surveilans epidemiologi, penguatan laboratorium kesehatan daerah, dan penyediaan logistik kesehatan darurat.
5. Inovasi dan Digitalisasi Layanan
   Dinas Kesehatan juga mendorong pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan dan manajemen kesehatan, melalui digitalisasi pencatatan dan pelaporan, layanan konsultasi kesehatan daring, serta integrasi data kesehatan lintas sektor.

Dengan perubahan tersebut, diharapkan pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2025 menjadi lebih tepat sasaran, efisien, serta mampu menjawab tantangan pembangunan kesehatan di tingkat lokal secara lebih efektif.

Secara umum, program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang pada Perubahan Rencana Kerja tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3.1.

Tabel 3.1
Perubahan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2025

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Indikator Sasaran	Urusan/ Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Indikator		Pagu Anggaran (Rp)			Keterangan
						Pada APBD TA 2025	Usulan Perubahan (Target)	Pada APBD TA 2025	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/ Berkurang	Status (Tetap/ Berubah /Baru/ Hapus)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat	Angka Kematian Ibu per 100.000 KH	54	**Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat**	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	Rasio	0.10	0.10	532.255.626.031,00	599.592.121.024,00	67.336.494.993,00	Berubah
	Angka Kematian Bayi per 1.000 KH	3		Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang Terakreditasi	Persen	92.59	92.59				
	Prevalensi Stunting	13		Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Persen	100	100				
	Persentase Penderita TB yang ditemukan dan diobati	88		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Persen	100	100				
	Persentase Sumber Daya Kesehatan sesuai Standar	82,5		Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100	100				
				Presentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Persen	100	100				

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Indikator Sasaran	Urusan/ Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Indikator		Pagu Anggaran (Rp)			Keterangan
						Pada APBD TA 2025	Usulan Perubahan (Target)	Pada APBD TA 2025	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/ Berkurang	Status (Tetap/ Berubah /Baru/ Hapus)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
				Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100	100				
				Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	100	100				
				Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	100	100				
				Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100	100				
				Persentase penderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100	100				
				Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Persen	100	100				
				Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Persen	100	100				

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Indikator Sasaran	Urusan/ Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Indikator		Pagu Anggaran (Rp)			Keterangan
						Pada APBD TA 2025	Usulan Perubahan (Target)	Pada APBD TA 2025	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/ Berkurang	Status (Tetap/ Berubah/ Baru/ Hapus)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
				Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Persen	100	100				
				Persentase Balita Wasting	Persen	100	100				
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Puskesmas	Persen	84.90	84.91				
				Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan Obat dan Vaksin Essensial	Persen	90.00	90.01				
				Persentase alat kesehatan memenuhi standar	Persen	82.00	82.01				
			Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki Izin Operasional	Unit	28	28	207.612.000,00	161.170.000,00	-46.442.000,00	Berubah
			Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	Unit	28	28	135.033.000,00	104.529.000,00	-30.504.000,00	Berubah

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Indikator Sasaran	Urusan/ Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Indikator		Pagu Anggaran (Rp)			Keterangan
						Pada APBD TA 2025	Usulan Perubahan (Target)	Pada APBD TA 2025	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/ Berkurang	Status (Tetap/ Berubah /Baru/ Hapus)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
			Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	Unit	48	48	72.579.000,00	56.641.000,00	-15.938.000,00	Berubah
			Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Unit	214	214	262.307.825.153,00	296.962.120.809,00	34.654.295.656,00	Berubah
			Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	Paket	4	4	351.600.000,00	348.315.000,00	-3.285.000,00	Berubah
			Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	Unit	0	0	-	-	-	Dihapus
			Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	Unit	1	1	141.246.000,00	109.954.000,00	-31.292.000,00	Berubah
			Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Unit	1	2	196.200.000,00	30.196.200.000,00	30.000.000.000,00	Berubah

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Indikator Sasaran	Urusan/ Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Indikator		Pagu Anggaran (Rp)			Keterangan
						Pada APBD TA 2025	Usulan Perubahan (Target)	Pada APBD TA 2025	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/ Berkurang	Status (Tetap/ Berubah /Baru/ Hapus)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
			Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara SesuaiStandar	Unit	140	140	4.223.674.000,00	3.948.740.000,00	-274.934.000,00	Berubah
			Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	20	600	94.129.361.773,00	95.817.110.333,00	1.687.748.560,00	Berubah
			Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan fasilitas Kesehatan Regional / Regional Maintenance Centre	Unit	2458	1.817	1.999.383.000,00	1.997.383.000,00	-2.000.000,00	Berubah
			Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Paket	4	4	138.064.775.110,00	139.437.628.206,00	1.372.853.096,00	Berubah
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	Keluarga	58150	58150	41.068.000,00	30.490.000,00	-10.578.000,00	Berubah

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Indikator Sasaran	Urusan/ Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Indikator		Pagu Anggaran (Rp)			Keterangan
						Pada APBD TA 2025	Usulan Perubahan (Target)	Pada APBD TA 2025	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/ Berkurang	Status (Tetap/ Berubah /Baru/ Hapus)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
			Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Unit	11	35	23.160.517.270,00	24.801.484.270,00	1.640.967.000,00	Berubah
			Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayananrumah sakit	Unit	2	1		274.816.000,00	274.816.000,00	Baru
			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Ketersediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Layanan	36	36	268.726.677.878,00	301.531.834.215,00	32.805.156.337,00	Berubah
			Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Laporan	1	1	12.276.330,00	8.334.000,00	-3.942.330,00	Berubah

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Indikator Sasaran	Urusan/ Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Indikator		Pagu Anggaran (Rp)			Keterangan
						Pada APBD TA 2025	Usulan Perubahan (Target)	Pada APBD TA 2025	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/ Berkurang	Status (Tetap/ Berubah /Baru/ Hapus)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
			Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dokumen	14	14	417.088.184,00	399.732.184,00	-17.356.000,00	Berubah
			Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	44	1	6.588.813.879,00	6.588.765.879,00	-48.000,00	Berubah
			Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Dokumen	4	5	9.104.856.000,00	22.604.333.790,00	13.499.477.790,00	Berubah
			Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	Unit	48	48	547.120.000,00	414.726.000,00	-132.394.000,00	Berubah
			Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Dokumen	1	1	170.544.000,00	124.032.000,00	-46.512.000,00	Berubah
			Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	2	2	4.053.076.559,00	4.025.325.359,00	-27.751.200,00	Berubah
			Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yangDidistribusikan	Paket	1	1	546.760.250,00	564.353.000,00	17.592.750,00	Berubah
			Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	24	24	208.228.068.455,00	223.213.760.472,00	14.985.692.017,00	Berubah
			Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil	Dokumen	4	1	2.165.700.000,00	2.165.700.000,00	-	Tetap

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Indikator Sasaran	Urusan/ Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Indikator		Pagu Anggaran (Rp)			Keterangan
						Pada APBD TA 2025	Usulan Perubahan (Target)	Pada APBD TA 2025	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/ Berkurang	Status (Tetap/ Berubah /Baru/ Hapus)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
				PengelolaanLayanan Imunisasi							
			Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Dokumen	3	4	181.200.000,00	181.200.000,00	-	Tetap
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Dokumen	1	1	110.432.200,00	79.985.000,00	-30.447.200,00	Berubah
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	Dokumen	1	1	174.250.000,00	151.947.000,00	-22.303.000,00	Berubah
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	284085	243.841	151.932.000,00	112.330.000,00	-39.602.000,00	Berubah
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	55500	59.161	140.748.000,00	116.412.000,00	-24.336.000,00	Berubah
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	4	4	20.963.696.671,00	26.447.585.981,00	5.483.889.310,00	Berubah

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Indikator Sasaran	Urusan/ Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Indikator		Pagu Anggaran (Rp)			Keterangan
						Pada APBD TA 2025	Usulan Perubahan (Target)	Pada APBD TA 2025	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/ Berkurang	Status (Tetap/ Berubah/ Baru/ Hapus)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan KesehatanSesuai Standar	Orang	58772	62.119	134.529.000,00	105.989.000,00	-28.540.000,00	Berubah
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	61571	65.077	3.899.507.796,00	3.589.160.196,00	-310.347.600,00	Berubah
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang	480	480	73.149.580,00	70.729.000,00	-2.420.580,00	Berubah
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	1	1	134.649.337,00	125.925.337,00	-8.724.000,00	Berubah
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	2	2	668.151.806,00	602.070.806,00	-66.081.000,00	Berubah
			Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkanpelayanan kesehatan malaria	Orang	22	22	38.692.680,00	31.415.780,00	-7.276.900,00	Berubah
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Orang	4219	4.498	484.531.592,00	433.337.772,00	-51.193.820,00	Berubah
			Pengelolaan pelayanan kesehatan orang	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang	Orang	464	402	33.346.000,00	15.356.000,00	-17.990.000,00	Berubah

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Indikator Sasaran	Urusan/ Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Indikator		Pagu Anggaran (Rp)			Keterangan
						Pada APBD TA 2025	Usulan Perubahan (Target)	Pada APBD TA 2025	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/ Berkurang	Status (Tetap/ Berubah /Baru/ Hapus)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
			dengan HIV (ODHIV)	mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar							
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan MasalahKejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang	533283	505.166	455.963.614,00	426.689.944,00	-29.273.670,00	Berubah
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	79559	83.065	1.126.812.000,00	1.122.312.000,00	-4.500.000,00	Berubah
			Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	10202	11.881	69.165.000,00	65.867.000,00	-3.298.000,00	Berubah
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	48578	48578	595.606.766,00	957.481.766,00	361.875.000,00	Berubah
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	229410	251.306	907.172.000,00	594.022.000,00	-313.150.000,00	Berubah
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	564526	565.940	1.506.057.005,00	1.448.440.005,00	-57.617.000,00	Berubah

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Indikator Sasaran	Urusan/ Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Indikator		Pagu Anggaran (Rp)			Keterangan
						Pada APBD TA 2025	Usulan Perubahan (Target)	Pada APBD TA 2025	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/ Berkurang	Status (Tetap/ Berubah/ Baru/ Hapus)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	2246044	2.328.163	151.058.370,00	144.443.200,00	-6.615.170,00	Berubah
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	43632	48.749	410.371.260,00	377.247.500,00	-33.123.760,00	Berubah
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	760275	760275	129.528.250,00	127.478.400,00	-2.049.850,00	Berubah
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaanpelayanan kesehatan reproduksi	Dokumen	3	1	904.005.022,00	904.005.022,00	-	Tetap
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Dokumen	12	12	47.898.000,00	35.337.000,00	-12.561.000,00	Berubah
			Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	1	1	369.292.000,00	369.292.000,00	-	Tetap
			Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	1	1	979.128.726,00	976.740.856,00	-2.387.870,00	Berubah

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Indikator Sasaran	Urusan/ Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Indikator		Pagu Anggaran (Rp)			Keterangan
						Pada APBD TA 2025	Usulan Perubahan (Target)	Pada APBD TA 2025	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/ Berkurang	Status (Tetap/ Berubah/ Baru/ Hapus)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
			Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Dokumen	44	1	268.003.566,00	268.003.566,00	-	Tetap
			Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Unit	1	1	1.556.587.980,00	1.354.396.400,00	-202.191.580,00	Berubah
			Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Dokumen	1	1	226.908.000,00	187.571.000,00	-39.337.000,00	Berubah
			Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Jumlah Penyelenggaraan Sistem InformasiKesehatan Secara Terintegrasi	Unit	1	1	1.013.511.000,00	936.996.000,00	-76.515.000,00	Berubah
			Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	umlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Dokumen	4	4	1.013.511.000,00	936.996.000,00	-76.515.000,00	Berubah
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	Persen	100	100	9.936.960.000,00	13.496.058.000,00	3.559.098.000,00	Berubah

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Indikator Sasaran	Urusan/ Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Indikator		Pagu Anggaran (Rp)			Keterangan
						Pada APBD TA 2025	Usulan Perubahan (Target)	Pada APBD TA 2025	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/ Berkurang	Status (Tetap/ Berubah/ Baru/ Hapus)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
				Persentase Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Persen	100	100				
			Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesehatan yang Mendapatkan Rekomendasi Izin Praktik di Wilayah Kabupaten Tangerang	Orang	190	190	67.957.000,00	41.557.000,00	-26.400.000,00	Berubah
			Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Dokumen	1	1	67.957.000,00	41.557.000,00	-26.400.000,00	Berubah
			Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang dikembangkan dan ditingkatkan Kompetensinya	Orang	100	100	1.620.657.000,00	1.601.955.000,00	-18.702.000,00	Berubah
			Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	Orang	100	100	1.620.657.000,00	1.601.955.000,00	-18.702.000,00	Berubah

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Indikator Sasaran	Urusan/ Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Indikator		Pagu Anggaran (Rp)			Keterangan
						Pada APBD TA 2025	Usulan Perubahan (Target)	Pada APBD TA 2025	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/ Berkurang	Status (Tetap/ Berubah/ Baru/ Hapus)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
			Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah terpenuhinya kebutuhan sumber daya manusia kesehatan	Orang	219	185	8.248.346.000,00	11.852.546.000,00	3.604.200.000,00	Berubah
			Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dokumen	1	1	74.264.000,00	74.264.000,00	-	Tetap
			Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan(Fasyankes)	Orang	219	219	8.174.082.000,00	11.778.282.000,00	3.604.200.000,00	Berubah
			Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase P-IRT yang sesuai standar	Persen	100	100	963.977.900,00	912.850.200,00	-51.127.700,00	Berubah
				Persentase sarana kefarmasian yang sesuai standar	Persen	100	100				
				Persentase TPM yang memenuhi syarat berdasarkan Inspeksi Kesehatan Lingkungan	Persen	100	100				

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Indikator Sasaran	Urusan/ Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Indikator		Pagu Anggaran (Rp)			Keterangan
						Pada APBD TA 2025	Usulan Perubahan (Target)	Pada APBD TA 2025	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/ Berkurang	Status (Tetap/ Berubah/ Baru/ Hapus)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
			Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Pemeriksaan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang memiliki izin/memenuhi standar	Unit	224	224	121.274.250,00	112.385.250,00	-8.889.000,00	Berubah
			Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek Toko Obat Toko Alat Kesehatan dan Optikal Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Dokumen	4	4	121.274.250,00	112.385.250,00	-8.889.000,00	Berubah
			Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Jumlah Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Unit	16	16	15.203.000,00	11.603.000,00	-3.600.000,00	Berubah

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Indikator Sasaran	Urusan/ Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Indikator		Pagu Anggaran (Rp)			Keterangan
						Pada APBD TA 2025	Usulan Perubahan (Target)	Pada APBD TA 2025	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/ Berkurang	Status (Tetap/ Berubah /Baru/ Hapus)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
			Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Dokumen	2	2	15.203.000,00	11.603.000,00	-3.600.000,00	Berubah
			Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Jumlah Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Unit	75	75	318.507.750,00	309.639.750,00	-8.868.000,00	Berubah
			Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	Unit	75	75	318.507.750,00	309.639.750,00	-8.868.000,00	Berubah
			Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran	Jumlah Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran	Sertifikat	50	50	95.913.900,00	82.466.200,00	-13.447.700,00	Berubah

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Indikator Sasaran	Urusan/ Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Indikator		Pagu Anggaran (Rp)			Keterangan
						Pada APBD TA 2025	Usulan Perubahan (Target)	Pada APBD TA 2025	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/ Berkurang	Status (Tetap/ Berubah/ Baru/ Hapus)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
			dan Depot Air Minum (DAM)	dan Depot Air Minum (DAM)							
			Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Dokumen	1	1	95.913.900,00	82.466.200,00	-13.447.700,00	Berubah
			Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tanggadan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Unit	16	250	413.079.000,00	396.756.000,00	-16.323.000,00	Berubah
			Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga Dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan	Dokumen	2	3	413.079.000,00	396.756.000,00	-16.323.000,00	Berubah

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Indikator Sasaran	Urusan/ Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Indikator		Pagu Anggaran (Rp)			Keterangan
						Pada APBD TA 2025	Usulan Perubahan (Target)	Pada APBD TA 2025	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/ Berkurang	Status (Tetap/ Berubah /Baru/ Hapus)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
			yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga							
			Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Organisasi Masyarakat kemitraan bidang Kesehatan	Persen	100	100	7.860.111.917,00	9.151.533.517,00	1.291.421.600,00	Berubah
				Persentase Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Tatanan Rumah Tangga	Persen	100	100				
				Persentase Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Tatanan institusi pendidikan	Persen	100	100				
			Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Bidang Kesehatan	Unit	16	16	6.919.346.400,00	8.402.163.000,00	1.482.816.600,00	Berubah
			Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dokumen	3	3	6.919.346.400,00	8.402.163.000,00	1.482.816.600,00	Berubah

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Indikator Sasaran	Urusan/ Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Indikator		Pagu Anggaran (Rp)			Keterangan
						Pada APBD TA 2025	Usulan Perubahan (Target)	Pada APBD TA 2025	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/ Berkurang	Status (Tetap/ Berubah /Baru/ Hapus)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
			Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Keluarga	330	330	532.310.000,00	382.940.000,00	-149.370.000,00	Berubah
			Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Sersih dan Sehat	Keluarga	40343	40343	170.010.000,00	113.928.000,00	-56.082.000,00	Berubah
			Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Dokumen	2	2	362.300.000,00	269.012.000,00	-93.288.000,00	Berubah
			Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Unit	1675	1675	408.455.517,00	366.430.517,00	-42.025.000,00	Berubah

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Indikator Sasaran	Urusan/ Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Indikator		Pagu Anggaran (Rp)			Keterangan
						Pada APBD TA 2025	Usulan Perubahan (Target)	Pada APBD TA 2025	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/ Berkurang	Status (Tetap/ Berubah/ Baru/ Hapus)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
			Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dokumen	2	2	408.455.517,00	366.430.517,00	-42.025.000,00	Berubah
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	Nilai AKIP	84,55	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Dinas Kesehatan	Persen	100	100	1.288.639.977.652,00	1.467.869.653.931,00	179.229.676.279,00	Berubah
				Persentase Laporan Kinerja BLUD Bidang Kesehatan	Persen	100	100				Berubah
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Dokumen	4	4	62.670.000,00	46.402.040,00	-16.267.960,00	Berubah
			Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	1	40.730.000,00	30.020.500,00	-10.709.500,00	Berubah
			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	1	7.320.000,00	5.489.770,00	-1.830.230,00	Berubah
			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	1	14.620.000,00	10.891.770,00	-3.728.230,00	Berubah
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	Dokumen	1	1	340.743.000,00	180.034.000,00	-160.709.000,00	Berubah

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Indikator Sasaran	Urusan/ Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Indikator		Pagu Anggaran (Rp)			Keterangan
						Pada APBD TA 2025	Usulan Perubahan (Target)	Pada APBD TA 2025	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/ Berkurang	Status (Tetap/ Berubah/ Baru/ Hapus)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							
			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	3	2	18.917.000,00	13.918.000,00	-4.999.000,00	Berubah
			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	175	218	321.826.000,00	166.116.000,00	-155.710.000,00	Berubah
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan	Laporan	5	5	547.558.595.890,00	548.831.569.966,00	1.272.974.076,00	Berubah
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	2	345.239.400,00	323.300.400,00	-21.939.000,00	Berubah
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	150	185	547.213.356.490,00	548.508.269.566,00	1.294.913.076,00	Berubah
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen	1	1	6.942.270.118,00	5.839.848.943,00	-1.102.421.175,00	Berubah
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi KunjunganTamu	Laporan	12	12	235.432.000,00	134.311.000,00	-101.121.000,00	Berubah
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	1	121.090.000,00	121.090.000,00	-	Tetap

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Indikator Sasaran	Urusan/ Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Indikator		Pagu Anggaran (Rp)			Keterangan
						Pada APBD TA 2025	Usulan Perubahan (Target)	Pada APBD TA 2025	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/ Berkurang	Status (Tetap/ Berubah /Baru/ Hapus)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	997.880.220,00	1.019.394.720,00	21.514.500,00	Berubah
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan danPenggandaan yang Disediakan	Paket	2	2	1.550.327.480,00	1.247.276.805,00	-303.050.675,00	Berubah
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	284.714.800,00	284.714.800,00	-	Tetap
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	1	1.043.291.618,00	1.279.901.618,00	236.610.000,00	Berubah
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	2.709.534.000,00	1.753.160.000,00	-956.374.000,00	Berubah
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen Pemeliharaan Barang MilikDaerahPenunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Unit	1	1	9.537.868.124,00	7.699.076.029,00	-1.838.792.095,00	Berubah
			Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	15	15	20.000.000,00	20.000.000,00	-	Tetap
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang	Unit	11	11	1.780.555.200,00	1.584.555.200,00	-196.000.000,00	Berubah
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	Unit	6	6	5.408.407.625,00	3.789.737.625,00	-1.618.670.000,00	Berubah

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Indikator Sasaran	Urusan/ Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Indikator		Pagu Anggaran (Rp)			Keterangan
						Pada APBD TA 2025	Usulan Perubahan (Target)	Pada APBD TA 2025	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/ Berkurang	Status (Tetap/ Berubah/ Baru/ Hapus)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
				Dipelihara/Direhabilitasi							
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	6	6	240.305.356,00	227.801.856,00	-12.503.500,00	Berubah
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	36	36	2.088.599.943,00	2.076.981.348,00	-11.618.595,00	Berubah
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dokumen	1	1	16.237.415.040,00	17.304.656.040,00	1.067.241.000,00	Berubah
			Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	7	7	2.544.407.340,00	2.736.359.340,00	191.952.000,00	Berubah
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang	Unit	4	4	6.415.407.900,00	6.810.405.500,00	394.997.600,00	Berubah
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	4	4	6.859.566.500,00	7.270.027.500,00	410.461.000,00	Berubah

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Indikator Sasaran	Urusan/ Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Indikator		Pagu Anggaran (Rp)			Keterangan
						Pada APBD TA 2025	Usulan Perubahan (Target)	Pada APBD TA 2025	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/ Berkurang	Status (Tetap/ Berubah /Baru/ Hapus)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	1	418.033.300,00	487.863.700,00	69.830.400,00	Berubah
			Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase BLUD yang melakukan pelayanan dan Penunjang pelayanan	Persen	48	100	653.460.008.407,00	842.530.101.597,00	189.070.093.190,00	Berubah
			Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	48	1	653.460.008.407,00	842.530.101.597,00	189.070.093.190,00	Berubah
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	1	1	53.700.662.773,00	44.844.536.451,00	-8.856.126.322,00	Berubah
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	12.390.971.886,00	9.001.212.383,00	-3.389.759.503,00	Berubah
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	40.920.855.387,00	35.663.804.068,00	-5.257.051.319,00	Berubah
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantoryang Disediakan	Laporan	12	12	388.835.500,00	179.520.000,00	-209.315.500,00	Berubah

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Indikator Sasaran	Urusan/ Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Indikator		Pagu Anggaran (Rp)			Keterangan
						Pada APBD TA 2025	Usulan Perubahan (Target)	Pada APBD TA 2025	Usulan Perubahan (Pagu Indikatif)	Bertambah/ Berkurang	Status (Tetap/ Berubah/ Baru/ Hapus)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	5	5	799.744.300,00	593.428.865,00	-206.315.435,00	Berubah
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	4	200.401.000,00	181.499.000,00	-18.902.000,00	Berubah
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	2	2	58.149.000,00	9.131.000,00	-49.018.000,00	Berubah
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	2	2	76.683.000,00	23.700.000,00	-52.983.000,00	Berubah
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	2	192.250.400,00	157.896.400,00	-34.354.000,00	Berubah
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	3	272.260.900,00	221.202.465,00	-51.058.435,00	Berubah
			Grand Total					**1.839.656.653.500**	**2.091.022.216.672**	**251.365.563.172**	

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Bappeda tahun 2020 disusun berdasarkan kaidah – kaidah yang diamanatkan dalam Permendagri Nomor 86 tahun 2017. Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang Tahun 2025 merupakan upaya Dinas Kesehatan untuk menyesuaikan rencana kerja dan anggarannya dengan perkembangan situasi dan kondisi yang terjadi. Perkembangan situasi dan kondisi tersebut dapat berimplikasi pada meningkatnya anggaran penerimaan maupun pengeluaran, atau sebaliknya.

Perubahan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang Tahun 2025 merupakan dokumen perubahan perencanaan untuk periode satu tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun oleh Dinas Kesehatan yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan, yang disusun berpedoman kepada Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026.

Perubahan ini menunjukkan adanya penguatan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas dan jangkauan layanan kesehatan, Pagu anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 yang semula sebesar Rp 1.839.656.653.500,- mengalami peningkatan menjadi Rp 2.091.022.216.672,- atau terdapat penambahan sebesar Rp 251.365.563.172,-.

Pelaksanaan Perubahan Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang Tahun 2025 akan dilakukan pemantauan secara berkala dan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati.

10. Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dengan bergulirnya otonomi daerah, ternyata membawa implikasi yang cukup besar pada berbagai kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintah di daerah baik dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan maupun pembiayaan pembangunan. Daerah memiliki hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai peraturan perundang-undangan. Hal ini sejalan dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang mendorong adanya paradigma baru dari sistem sentralisasi menuju sistem desentralisasi. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan landasan hukum bagi sistem perencanaan pembangunan yang didalamnya memuat tahapan perencanaan pembangunan terdiri dari perencanaan jangka panjang, menengah dan tahunan, yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan dan masyarakat. Khusus perencanaan tahunan atau disebut Rencana Kerja (Renja) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang secara teknis pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, menyebutkan bahwa Renja Perangkat Daerah memuat program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pagu indikatif dan prakiraan maju.

Sebagai implikasi dari berlakunya Undang-undang Nomor 25 tahun 2004, Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Pemerintah Kabupaten Tangerang berkewajiban menyusun perencanaan program dan kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Daerah dan program kerja tahunan yang disebut dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Dalam hal ini Kepala Perangkat Daerah Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air berperan dan bertanggungjawab untuk menyiapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah dalam rangka menjamin keterkaitan dan keselarasan visi misi Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air dengan visi misi kepala daerah terpilih. Program dan kegiatan dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah masih bersifat indikatif yang diselaraskan dengan program dan kegiatan prioritas daerah. Pada tahap ini dilakukan kegiatan perencanaan, analisis dan kajian berdasarkan evaluasi pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya, isu pembangunan nasional dan daerah maupun kebijakan APBD Penyusunan Rencana Kerja Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air yang dilakukan melalui dua tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, mencakup :

- Tahap perumusan rancangan Rencana Kerja dan

- Tahap penyajian rancangan Rencana Kerja

Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang sebagai tindak lanjut Otonomi Daerah telah membentuk Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Tangerang sebagai instansi teknis yang mempunyai tugas pokok perencanaan, melaksanakan dan mengendalikan Pembangunan, Peningkatan, Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Sumber Daya Air.

1.2. LANDASAN HUKUM

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Tangerang berdasarkan kepada Peraturan Perundangan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah,
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara,
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah,
7. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daaerah,
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda RPJPD, RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD;
9. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri Nomor 0295/M.PPN/2005 dan 050/166/SJ/2005 Tentang Petunjukan Teknis Penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2005,
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang,
11. Keputusan Bupati Tangerang Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Tangerang.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1. Maksud

Maksud dan Tujuan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Tangerang tahun 2025 sebagai berikut :

1. Menindak lanjuti Agenda dan Program Prioritas Nasional tahun 2025 yang memerlukan peran Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air sebagai instansi teknis pada Pemerintahan Kabupaten Tangerang.
2. Merumuskan Program dan Kegiatan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Tangerang pada tahun 2025.
3. Mengakomodir Program dan Kegiatan Daerah yang akan dibiayai dari APBD Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2025 melalui Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Tangerang.

1.3.2. Tujuan

1. Mensinkronkan program dan kegiatan lima tahunan dan tahunan yang berasal dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Bina Marga Dan Sumber Daya Air dengan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tangerang yang memerlukan dukungan pendanaan APBD Kabupaten Tangerang.
2. Menetapkan program dan kegiatan tahunan pada Renja OPD berdasarkan hasil sinkronisasi antara program dan kegiatan pembangunan yang berasal dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tangerang.

1.4. RUANG LINGKUP

Berdasarkan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Tangerang mempunyai tugas membantu Bupati merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan urusan pemerintahan bidang kebinamargaan dan Sumber Daya Air yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut dinas bina marga dan sumber daya air mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Perumusan kebijakan teknis yang terkait dengan bina marga, Sumber Daya Air dan Drainase.
b. Pelaksanaan kebijakan yang terkait dengan Bina Marga, Sumber Daya Air dan Drainase.
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan yang terkait dengan bina marga, Sumber Daya Air dan Drainase.
d. Pelaksanaan administrasi yang terkait dengan bina marga ,Sumber Daya Air dan Drainase.
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
f.

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah

Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air tahun 2025 pada intinya memuat tujuan, strategi, kebijakan dan program dan kegiatan indikatif sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air Kabupaten Tangerang dalam mengemban visi misi Pembangunan Kabupaten Tangerang.

Sistematika penulisan Rencana Kerja Perubahan tahun 2025 Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air meliputi 4 (Empat) bab berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Ruang Lingkup
- 1.5 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2025

- 2.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 s.d Triwulan II
- 2.2 Analisis Kinerja Perangkat Daerah
- 2.3 Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
- 2.4 Capaian Target dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 sd Triwulan II

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

- 3.1 Program dan Kegiatan Tahun 2025

BAB IV PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2025 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

2.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 Sampai dengan Triwulan II

Pelaporan kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Tangerang Tahun 2025, Indikator Kinerja Utama Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Tangerang berdasarkan RPD Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air 2024-206 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang telah ditetapkan sebanyak 3 Sasaran Strategis dan sebanyak 4 Indikator Kinerja Utama (*outcomes*) dengan rincian sebagai berikut:

Sasaran 1 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

1. Nilai Akip Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air

Sasaran 2 : Meningkatkan kualitas infrastruktur Jalan Kabupaten

1. Prosentase infrastruktur Jalan Kabupaten dalam kondisi mantap

Sasaran 3 **:** Meningkatkan kualitas infrastruktur Sungai, Saluran Pembuang dan Daerah Irigasi

1. Prosentase infrastruktur Sungai dan saluran pembuang dalam Kondisi baik
2. Prosentase luas lahan Pertanian Berkelanjutan yang terlayani irigasi

A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA

Dalam rangka mengukur dan meningkatkan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Sebagai upaya untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah, Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Nomor 600/1713/DBMSDA/IV/2023 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Tangerang sebagai pembaruan atas Peraturan Bupati Tangerang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2019-2023 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang pada tanggal 21 Maret 2019, reviu terhadap Indikator Kinerja Utama ini dilakukan dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Capaian Indikator Kinerja Utama ditentukan atas target yang akan dicapai dengan cara pengukuran atau formulasi yang telah ditetapkan. Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Tangerang Tahun 2025 menunjukan hasil sebagai berikut:

Tabel 2.1

Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Tangerang Tahun 2025 sampai dengan Triwulan II

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Nilai Sakip dan RB Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air	Nilai	82,37	79,31	96,29
2	Prosentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap	%	93,18	95,19	102,16
3	Persentase Infrastruktur SDA yang Berkualitas	%	38,32	38,32	100
4	Prosentase Infrastruktur Drainase yang tertangani	%	11,93	11,93	100

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

1. Capaian kinerja yang melebih/melampaui target ditunjukan pada:
   - Indikator Prosentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap dengan capaian kinerja 102,16%.
   - Indikator Persentase Infrastruktur SDA yang Berkualitas dengan capaian kinerja 100%;
   - Indikator Prosentase Infrastruktur Drainase yang tertangani dengan capaian kinerja 100%;
2. Capaian Indikator yang belum mencapai target yaitu
   - Indikator Nilai Sakip dan RB Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air dengan capaian kinerja 96,29%.

B. CAPAIAN SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

Tabel 2.2

Capaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Tangerang Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi S.d Tw II	Capaian %
1	Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan	Nilai Sakip dan RB Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air	Nilai	82,37	79,31	96,29
2	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan Kabupaten	Prosentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap	%	93,18	95,19	102,16
3	Meningkatnya Kualitas	Persentase Infrastruktur	%	38,32	38,32	100

	Infrastruktur SDA	SDA yang Berkualitas				
4	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Drainase	Prosentase Infrastruktur Drainase yang tertangani	%	11,93	11,93	100

Tabel diatas merupakan Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja DBMSDA dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 Kabupaten Tangerang.

Untuk indikator kinerja prosentase jalan dalam kondisi mantap realisasi sebesar 95.19% masih menggunakan SK jalan Kabupaten Nomor : 761/Kep.539-Huk/2011 tentang penetapan status jalan kabupaten dan pada tahun 2024 sudah disahkan SK jalan Nomor : 600.1/Kep.899-Huk/2024 Tentang penetapan ruas jalan menurut statusnya sebagai ruas jalan Kabupaten sehingga data kondisi jalan Kabupaten mengalami perubahan sebagai berikut

DATA KONDISI JALAN KABUPATEN

SK jalan Nomor : 600.1/Kep.899-Huk/2024

2024	Uraian	Panjang	Prosentase	
Mantap	Baik	684,10	62,40%	
	Sedang	126,49	11,54%	73,94%
Tidak Mantap	Rusak Ringan	186,81	17,04%	
	Rusak Berat	98,87	9,02%	26,06%
		1096,26	100,00%	

Rekapitulasi Updating SK Jalan 2024

Berdasarkan Panjang Jalan (m)

Keterangan Perbaikan	JKP-4	JLP	JLING-P	Grand Total
Digabung			1	1
Diperbarui (Potong)	1	8	8	17
Diperbarui (Ubah Trase & Nama)		14	5	19
Diperbarui (Ubah Trase)		21	4	25
Ditambahkan	9	57	68	134
Ganti Nama	93	121	42	256
Pecah Ruas	16	16	3	35
Tetap	189	301	120	610
Grand Total	**308**	**536**	**252**	**1.096**

Keterangan Perbaikan	JKP-4	JLP	JLING-P	Grand Total
Dihapus	0	11	16	28
Grand Total	**0**	**11**	**16**	**28**

Berdasarkan Jumlah Jalan (ruas)

Keterangan Perbaikan	JKP-4	JLP	JLING-P	Grand Total
Digabung			1	1
Diperbarui (Potong)	1	3	4	8
Diperbarui (Ubah Trase & Nama)		5	2	7
Diperbarui (Ubah Trase)		8	2	10
Ditambahkan	1	32	43	76
Ganti Nama	17	38	16	71
Pecah Ruas	4	7	2	13
Tetap	34	97	54	185
Grand Total	**57**	**190**	**124**	**371**

Keterangan Perbaikan	JKP-4	JLP	JLING-P	Grand Total
Dihapus	1	5	6	12
Grand Total	**1**	**5**	**6**	**12**

2.2. ANALISIS KINERJA PERANGKAT DAERAH

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Tangerang

INDIKATOR	Baseline	IKK	TARGET RPD TAHUN			REALISASI CAPAIAN
	2022		2024	2025	2026	2024
Persentase infrastruktur SDA yang berkualitas	63,60%		74,00%	84,00%	94,00%	74%
Prosentase Infrastruktur drainase dalam kondisi baik	11,43%		11,93%	12,43%	12,93%	11,93%
Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap	92,59%	1.c.7	93,18%	93,77%	94,36%	95,19%

Tabel di atas menunjukkan capaian kinerja pelayanan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Tangerang berdasarkan indikator kinerja kunci (IKK) dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2024–2026. Indikator yang digunakan mencakup persentase infrastruktur sumber daya air (SDA) yang berkualitas, infrastruktur drainase dalam kondisi baik, serta jalan kabupaten dalam kondisi mantap. Terlihat bahwa pada tahun 2024, capaian realisasi sudah sesuai atau bahkan melebihi target untuk beberapa indikator, seperti jalan kabupaten yang mencapai kondisi mantap sebesar 95,19%, lebih tinggi dari target 93,18%.

Tabel 2.5
Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Renstra 2025-2029

INDIKATOR	Baseline		TARGET RENSTRA TAHUN				
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Persentase infrastruktur SDA dalam kondisi baik (%)	8,20%	11,48 %	13,25 %	14,95 %	16,67 %	18,39%	20,12%
Persentase infrastruktur Pengendali Banjir dalam kondisi baik (%)	9,98%	16,25 %	19,57 %	22,79 %	26,12 %	29,45%	32,80%
Persentase infrastruktur Daerah Irigasi (LSD) dalam kondisi baik (%)	6,42%	6,71%	6,93%	7,12%	7,23%	7,34%	7,45%
Persentase infrastruktur Drainase dalam kondisi baik (%)	12,49 %	13,09 %	13,69 %	14,29 %	14,89 %	15,49%	16,09%
Persentase jalan Kabupaten dalam kondisi Mantap (%)	73,94 %	75,54 %	78,27 %	81,01 %	83,75 %	86,48%	89,22%

Sementara itu, Tabel 2.5 menyajikan indikator kinerja utama (IKU) yang telah disesuaikan dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) DBMSDA 2025–2029, yang merujuk pada arah kebijakan pembangunan daerah terbaru melalui Asta Cipta Bupati terpilih. Terdapat beberapa perubahan penting dalam indikator yang digunakan. Pertama, indikator "persentase infrastruktur SDA yang berkualitas" diubah menjadi "persentase infrastruktur SDA dalam kondisi baik" dan baseline-nya disesuaikan secara lebih rinci. Kedua, terdapat penambahan indikator baru yang lebih spesifik seperti "persentase infrastruktur pengendali banjir dalam kondisi baik" dan "persentase infrastruktur daerah irigasi (LSD) dalam kondisi baik", yang sebelumnya tidak terakomodasi dalam IKU RPD. Selain itu, target yang ditetapkan dalam Renstra terbaru bersifat bertahap dan progresif hingga tahun 2030.

Perubahan indikator ini menunjukkan adanya penyempurnaan dalam kerangka pengukuran kinerja yang lebih menyeluruh dan responsif terhadap tantangan aktual di lapangan, seperti banjir, irigasi, dan kualitas infrastruktur. Capaian RPD Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air tahun 2024–2026 menjadi dasar evaluasi untuk peningkatan kualitas dan cakupan program ke depan. Dengan adanya indikator yang lebih rinci dan terukur dalam Renstra 2025–2029, DBMSDA diharapkan dapat lebih fokus dalam pengelolaan infrastruktur strategis secara berkelanjutan dan berorientasi pada pelayanan publik yang lebih baik.

Program Unggulan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air pada tahun 2025-2029 adalah "Sistem Lingkungan Yang Ramah dan Berkesinambungan (SELARAS) terdiri dari 3 Program yaitu Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase dengan sub kegiatan Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan, Program Penyelenggaraan Jalan dengan sub kegiatan Pembangunan Jalan, Rehabilitasi Jalan dan Rekonstruksi Jalan, dan yang terakhir Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) dengan sub kegiatan Pembangunan Polder Kolam Retensi.

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
	Program Unggulan			
1	**SISTEM LINGKUNGAN YANG AMAN, RAMAH DAN BERKESINAMBUNGAN (SELARAS)**	**Revitalisasi Drainase Pada Ruas Jalan Strategis Kabupaten, Pembangunan Jalan Baru dan Pembangunan Jalan Penghubung antar Kawasan Perumahan dan Permukiman serta Penyediaan Angkutan Sekolah dan Angkutan Publik**		
	1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Revitalisasi Drainase Pada Ruas Jalan Strategis Kabupaten	1.03.06.2.01.0012 Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	
	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten	1.03.10.2.01.0053 Pembangunan Jalan	
			1.03.10.2.01.0055 Rehabilitasi Jalan	
			1.03.10.2.01.0059 Rekontruksi Jalan	
		Pembangunan Kolam Retensi/Polder/Bendung/Tandon Pengendali Banjir, Penyediaan Air Baku, Sekaligus Kawasan Wisata Baru		
	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pembangunan Folder/Danau	1.03.02.2.01.0124 Pembangunan Polder/Kolam Retensi	

Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Isu-isu penting yang terkait dengan pelayanan/tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah:

1. Adanya perubahan-perubahan indikator berdasarkan hasil review di mana perubahan indikator tersebut telah mencerminkan kinerja yang dapat dirasakan oleh masyarakat.
2. Penggunaan sumber daya secara efektif.
3. Pembangunan prasarana jalan terus ditumbuh kembangkan dan diserasikan dengan perkembangan angkutan jalan raya dengan pembangunan jalan baru;
4. Memperhatikan aspirasi masyarakat dan pihak terkait dengan secepatnya melakukan tindakan perbaikan jalan yang mengalami kerusakan;
5. Belum optimalnya Normalisasi Saluran Pembuang dan Sungai sehingga masih ada wilayah yang mengalami genangan;
6. Kondisi jumlah kendaraan yang tidak seimbang dengan kapasitas jalan yang tersedia;

Adapun Permasalahan dan kendala yang dihadapi oleh Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Tangerang adalah :

1. Adanya perubahan-perubahan indikator berdasarkan hasil review di mana perubahan indikator tersebut telah mencerminkan kinerja yang dapat dirasakan oleh masyarakat.
2. Penggunaan sumber daya secara efektif.
3. Alokasi anggaran pemeliharaan/ rehabilitasi kurang ideal, alokasi tidak sesuai dengan tingkat kerusakan jalan.
4. Tonase kendaraan melebihi kapasitas yang ditentukan.
5. Kurang optimalnya segi pengawasan yang berimbas pada temuan PPHP yang berdampak pada silpa.
6. Kurang optimalnya segi pengawasan yang berimbas pada temuan PPHP yang berdampak pada silpa.

Beberapa Solusi untuk pemecahan masalah dan kendala :

1. Upaya perbaikan dalam penyusunan program dan kegiatan dengan memprioritaskan program dan kegiatan untuk mendukung keberhasilan pencapaian indikator sasaran.
2. Peningkatan perbaikan dan rehabilitasi jalan kabupaten sehingga mengurangi prosentasi jalan rusak di Kabupaten Tangerang.
3. Peningkatan pembangunan Daerah irigasi di Kabupaten Tangerang,
4. Peningkatan kegiatan pelaksanaan normalisasi saluran sungai.

2.3. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Musyawarah Forum Perangkat Daerah merupakan forum pemangku kepentingan guna membahas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sesuai dengan pentahapannya forum perangkat daerah bertujuan untuk:

1. Membahas dan menyepakati usulan-usulan dari para pemangku kepentingan terkait rencana kegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten Tangerang;

2. Membahas dan menyepakati kegiatan prioritas pembangunan di wilayah wilayah Kabupaten Tangerang yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan yang diusulkan melalui musyawarah perencanaan pembangunan ditingkat Kecamatan;
3. Penyelarasan prioritas dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten/ Kota dengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan daerah provinsi.
4. Klarifikasi usulan program dan kegiatan tahun 2025 yang disampaikan masyarakat;
5. Penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan pembangunan yang diampu Dinas Dinas Bina dan Sumber Daya Air;

Tabel Usulan Program dan Kegiatan
Tahun 2025

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Target indikator	Satuan	Catatan
1	2	7	9	8	
1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**				
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Prosentase Lahan Sawah Dilindungi yang Terlayani Irigasi	-	%	
		Persentase Infrastruktur Sungai dan Pembuang dalam Kondisi Baik	-	%	
1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Panjang infrastruktur Sungai dan saluran pembuang terbangun	-	Km	
1.03.02.2.01.0013	*Pembangunan Stasiun Pompa Banjir*	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dibangun	2	Unit	
1.03.02.2.01.0072	*Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten/Kota*	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun	25	Dokumen	
1.03.02.2.01.0073	*Operasi dan Pemeliharaan Sungai*	Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara	-	Km	
1.03.02.2.01.0075	*Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota*	Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan	10	Kelompok	
1.03.02.2.01.0078	*Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota*	Jumlah peserta yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	-	Dokumen	
1.03.02.2.01.0079	*Operasi dan Pemeliharaan Danau*	Jumlah Danau yang Dioperasikan dan Dipelihara	1	bidang	
1.03.02.2.01.0093	*Normalisasi/Restorasi Sungai*	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	9.7	Km	
1.03.02.2.01.0109	*Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing*	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	-	Km	
1.03.02.2.01.0110	*Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing*	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Direhabilitasi	-	Km	
1.03.02.2.01.0115	*Pembangunan Tanggul Sungai*	Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun	-	Km	
1.03.02.2.01.0118	*Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota*	Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun	1	Dokumen	
1.03.02.2.01.0120	*Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai*	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun	4	Dokumen	

1.03.02.2.01.0121	*Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya*	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	-	Unit	
1.03.02.2.01.0124	*Pembangunan Polder/Kolam Retensi*	Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Dibangun	-	Unit	
1.03.02.2.01.0125	*Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir*	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Dibangun	-	Unit	
1.03.02.2.01.0126	*Rehabilitasi Tanggul Sungai*	Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi	-	Km	
1.03.02.2.01.0128	*Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya*	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	-	Dokumen	
1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Luas Lahan Sawah Dilindungi yang Terlayani Irigasi	-	hektar	
1.03.02.2.02.0002	*Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan*	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	-	Km	
1.03.02.2.02.0014	*Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan*	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	-	Km	
1.03.02.2.02.0030	*Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota*	Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang Diperkuat Kapasitasnya	-	buah	
1.03.02.2.02.0035	*Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa*	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun	-	Dokumen	
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Prosentase Infrastruktur Drainase dalam Kondisi Baik	-	%	
1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Infrastruktur Drainase yang Tertangani	0.5	%	
		-	-	Km	
		Panjang Infrastruktur Drainase yang Tertangani	-	%	
1.03.06.2.01.0012	*Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan*	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	-	Meter	
1.03.06.2.01.0019	*Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan*	Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara	10000	Meter	
1.03.06.2.01.0023	*Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan*	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun	15	Dokumen	
1.03.06.2.01.0026	*Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan*	Jumlah Sarana Pendukung Drainase Perkotaan yang tersedia	15	Unit	
1.03.06.2.01.0026	*Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan*	Jumlah Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan yang Disediakan	6	Unit	
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Peningkatan dan Rehabilitasi Jalan Kabupaten	-	%	
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang Peningkatan dan Rehabilitasi Jalan Kabupaten Tertangani	-	Km	
1.03.10.2.01.0028	*Pengelolaan Leger Jalan*	Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola	5	Dokumen	
1.03.10.2.01.0029	*Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan*	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	5	Dokumen	
1.03.10.2.01.0031	*Penggantian Jembatan*	Jumlah Jembatan yang Diganti	-	ruas	
1.03.10.2.01.0032	*Pembangunan Jalan*	Panjang Jalan yang Dibangun	1.1	Km	
1.03.10.2.01.0033	*Rekonstruksi Jalan*	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	-	Km	
1.03.10.2.01.0037	*Pelebaran Jalan Menuju Standar*	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar	-	Km	
1.03.10.2.01.0040	*Pembangunan Jembatan*	Jumlah Jembatan yang dibangun	-	ruas	
1.03.10.2.01.0043	*Survey Kondisi Jalan/Jembatan*	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey	0.5	Km	
1.03.10.2.01.0044	*Rehabilitasi Jalan*	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	-	Km	

Dalam rangka pelaksanaan program strategis pembangunan infrastruktur bidang pekerjaan umum, khususnya sektor jalan, drainase, dan sumber daya air, Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) menetapkan arah kebijakan dan target kinerja yang selaras dengan kebutuhan pembangunan daerah.

Pada tahun 2025, berdasarkan Renstra DBMSDA 2024–2026, telah ditetapkan target capaian fisik sebagai berikut:

- Penyelenggaraan jalan sepanjang 13,9 km,
- Pengelolaan sistem drainase sepanjang 11 km, dan
- Pengelolaan sumber daya air (SDA) sepanjang 16 km.

Namun demikian, dalam rangka penyesuaian arah kebijakan pembangunan jangka menengah, Pemerintah Daerah telah menyusun draft Renstra DBMSDA 2025–2029 sebagai dokumen strategis terbaru. Dalam draft tersebut, ditetapkan peningkatan target capaian program secara signifikan, yaitu:

- Penyelenggaraan jalan sepanjang 30 km,
- Pengelolaan sistem drainase sepanjang 15 km, dan
- Pengelolaan SDA sepanjang 20 km.

Seiring dengan pembahasan dan penyesuaian dokumen perencanaan, target yang digunakan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun 2025 mengacu pada draft Renstra DBMSDA 2025–2029.

Penggunaan target dari draft Renstra 2025–2029 dalam APBD Perubahan dilakukan sebagai bentuk sinkronisasi antara arah kebijakan anggaran dan dokumen perencanaan yang sedang dikembangkan. Hal ini dilakukan untuk:

1. Menyesuaikan prioritas pembangunan terbaru yang telah disepakati pada forum teknis dan musrenbang.
2. Mengakomodasi target yang lebih progresif dan responsif terhadap kebutuhan infrastruktur strategis daerah.
3. Menjaga kesinambungan antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program, sehingga kebijakan anggaran dapat langsung mendukung pencapaian target jangka menengah baru.

Dengan demikian, penggunaan target draft Renstra 2025–2029 dalam APBD-P merupakan langkah strategis untuk memastikan konsistensi perencanaan dan pembiayaan pembangunan, serta kesiapan Dinas dalam mengimplementasikan kebijakan yang lebih ambisius dan berorientasi pada pelayanan publik yang lebih baik.

2.4 Capaian Target dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 sampai dengan Triwulan II

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Capaian (%)	Realisasi Fisik Kegiatan (%)	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Satuan	Target Indikator	Realisasi Indikator	Capaian (%)	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5=[4/3]*100	6	7	8	9	10	11=[10/9]*100	12
1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**										
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	41.907.063.983	10.332.859.879	24.66 %	94.44 %	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	%	100	100	100.00 %	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	204.317.450	33.788.750	16.54 %	100.00 %	Jumlah Dokumen perencanaan yang tersedia	Dokumen	3	3	100.00 %	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
1.03.01.2.01.0001	*Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	121.927.050	26.620.500	21.83 %	100.00 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1	1	100.00 %	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
1.03.01.2.01.0006	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	13.994.000	3.971.000	28.38 %	100.00 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	1	1	100.00 %	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
1.03.01.2.01.0007	*Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	68.396.400	3.197.250	4.67 %	100.00 %	"Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah"	Dokumen	1	1	100.00 %	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	36.227.341.563	8.898.676.095	24.56 %	100.00 %	Ketersediaan dokumen pelaporan Keuangan	Dokumen	1	1	100.00 %	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
1.03.01.2.02.0001	*Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	36.124.054.513	8.876.896.095	24.57 %	100.00 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	147	147	100.00 %	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
1.03.01.2.02.0007	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD*	103.287.050	21.780.000	21.09 %	100.00 %	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dokumen	1	1	100.00 %	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
1.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	13.424.000	0	0.00 %	0.00 %	Tersedianya dokumen Asset SKPD/Barang Daerah	Dokumen	1	0	0.00 %	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
1.03.01.2.03.0004	*Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada*	13.424.000	0	0.00 %	0.00 %	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Dokumen	1	0	0.00 %	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	370.717.000	0	0.00 %	0.00 %	Jumlah aparatur yang meningkat kapasitasnya	Orang	5	5	100.00 %	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
1.03.01.2.05.0009	*Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi*	370.717.000	0	0.00 %	0.00 %	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	-	-	0.00 %	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.006.981.200	832.821.684	41.50 %	100.00 %	Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jenis	2	2	100.00 %	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
1.03.01.2.06.0002	*Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	856.953.600	83.009.500	9.69 %	100.00 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	4	100.00 %	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
1.03.01.2.06.0004	*Penyediaan Bahan Logistik Kantor*	209.548.800	207.082.000	98.82 %	100.00 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	46	46	100.00 %	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
1.03.01.2.06.0005	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	92.845.000	81.545.000	87.83 %	100.00 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	13	13	100.00 %	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
1.03.01.2.06.0006	*Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan*	28.800.000	7.200.000	25.00 %	100.00 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1500	1500	100.00 %	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
1.03.01.2.06.0008	*Fasilitasi Kunjungan Tamu*	143.440.000	23.360.000	16.29 %	100.00 %	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dokumen	75	75	100.00 %	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
1.03.01.2.06.0009	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	675.393.800	430.625.184	63.76 %	100.00 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dokumen	50	50	100.00 %	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	211.991.400	0	0.00 %	0.00 %	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah	Jenis	1	1	100.00 %	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
1.03.01.2.07.0005	*Pengadaan Mebel*	211.991.400	0	0.00 %	0.00 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	-	-	0.00 %	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.016.036.800	228.542.362	22.49 %	100.00 %	Terlaksananya jasa penunjang urusan pemerintahan	Jenis	3	3	100.00 %	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
1.03.01.2.08.0001	*Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	33.534.000	7.130.500	21.26 %	100.00 %	"Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat"	Dokumen	400	400	100.00 %	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air

1.03.06.2.01.0026	*Pengadaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan*	16.483.918.389	2.012.882.200	12.21 %	100.00 %	Jumlah Sarana Pendukung Drainase Perkotaan yang tersedia	Unit	15	15	100.00 %	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
1.03.06.2.01.0026	*Pengadaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan*	16.483.918.389	2.012.882.200	12.21 %	25.00 %	Jumlah Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan yang Disediakan	Unit	6	6	100.00 %	UPT Peralatan dan Perbengkelan
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	264.434.337.110	31.769.591.840	12.01 %	100.00 %	Persentase Peningkatan dan Rehabilitasi Jalan Kabupaten	%	-	-	0.00 %	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	264.434.337.110	31.769.591.840	12.01 %	100.00 %	Panjang Peningkatan dan Rehabilitasi Jalan Kabupaten Tertangani	Km	-	-	0.00 %	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
						-	Km	-	-	0.00 %	UPT Pembangunan dan Pemeliharaan Sumber Daya Air Wilayah III
						Panjang Peningkatan dan Rehabilitasi Jalan Kabupaten Tertangani	Km	-	-	0.00 %	UPT Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah I
						Panjang Peningkatan dan Rehabilitasi Jalan Kabupaten Tertangani	Km	-	-	0.00 %	UPT Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah II
						Panjang Peningkatan dan Rehabilitasi Jalan Kabupaten Tertangani	Km	-	-	0.00 %	UPT Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah III
						Panjang Peningkatan dan Rehabilitasi Jalan Kabupaten Tertangani	Km	-	-	0.00 %	UPT Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah IV
						Panjang Peningkatan dan Rehabilitasi Jalan Kabupaten Tertangani	Km	-	-	0.00 %	UPT Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah V
						Panjang Peningkatan dan Rehabilitasi Jalan Kabupaten Tertangani	Km	-	-	0.00 %	UPT Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah VI
						Panjang Peningkatan dan Rehabilitasi Jalan Kabupaten Tertangani	Km	-	-	0.00 %	UPT Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah VII
						Panjang Peningkatan dan Rehabilitasi Jalan Kabupaten Tertangani	Km	-	-	0.00 %	UPT Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah VIII
1.03.10.2.01.0028	*Pengelolaan Leger Jalan*	2.940.356.800	964.115.000	32.79 %	100.00 %	Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola	Dokumen	5	26	520.00 %	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
1.03.10.2.01.0029	*Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan*	6.093.949.633	2.604.809.850	42.74 %	100.00 %	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	Dokumen	5	9	180.00 %	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
1.03.10.2.01.0031	*Penggantian Jembatan*	21.640.137.400	0	0.00 %	0.00 %	Jumlah Jembatan yang Diganti	ruas	-	-	0.00 %	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
1.03.10.2.01.0032	*Pembangunan Jalan*	23.771.159.350	1.695.213.000	7.13 %	100.00 %	Panjang Jalan yang Dibangun	Km	1.1	1.1	100.00 %	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
1.03.10.2.01.0033	*Rekonstruksi Jalan*	72.625.276.762	0	0.00 %	0.00 %	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	Km	-	-	0.00 %	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
1.03.10.2.01.0037	*Peleburan Jalan Menuju Standar*	3.150.000.000	0	0.00 %	0.00 %	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar	Km	-	-	0.00 %	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
1.03.10.2.01.0040	*Pembangunan Jembatan*	15.141.348.200	0	0.00 %	0.00 %	Jumlah Jembatan yang dibangun	ruas	-	-	0.00 %	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
1.03.10.2.01.0043	*Survey Kondisi Jalan/Jembatan*	670.194.990	527.010.250	78.64 %	100.00 %	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey	Km	0.5	0.5	100.00 %	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
1.03.10.2.01.0044	*Rehabilitasi Jalan*	57.242.723.625	0	0.00 %	0.00 %	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	Km	-	-	0.00 %	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
1.03.10.2.01.0046	*Pemeliharaan Rutin Jalan*	61.161.190.350	25.978.443.740	42.48 %	100.00 %	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	Km	10	10.29	102.90 %	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
1.03.10.2.01.0047	*Pembangunan Underpass*	0	0	0.00 %	0.00 %	Panjang Underpass yang dibangun	Meter	-	-	0.00 %	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
1.03.10.2.01.0011	*Pemeliharaan Rutin Jalan*	7.584.850.000	3.660.652.800	48.26 %	25.00 %	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	Km	1.2	0.64	53.33 %	UPT Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah I
1.03.10.2.01.0011	*Pemeliharaan Rutin Jalan*	7.376.352.000	3.188.786.400	43.23 %	25.00 %	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	Km	1.2	1.2	100.00 %	UPT Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah II
1.03.10.2.01.0011	*Pemeliharaan Rutin Jalan*	7.830.250.350	3.746.848.920	47.85 %	25.00 %	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	Km	1.5	1.5	100.00 %	UPT Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah III
1.03.10.2.01.0011	*Pemeliharaan Rutin Jalan*	8.202.632.500	3.582.140.920	43.67 %	25.00 %	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	Km	1.5	1.5	100.00 %	UPT Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah IV
1.03.10.2.01.0011	*Pemeliharaan Rutin Jalan*	7.915.447.500	3.529.437.400	44.59 %	25.00 %	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	Km	1.25	1.25	100.00 %	UPT Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah V
1.03.10.2.01.0011	*Pemeliharaan Rutin Jalan*	7.549.802.000	2.413.875.000	31.97 %	25.00 %	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	Km	1.5	1.5	100.00 %	UPT Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah VI
1.03.10.2.01.0011	*Pemeliharaan Rutin Jalan*	7.285.541.000	2.704.350.300	37.12 %	25.00 %	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	Km	1.2	1.2	100.00 %	UPT Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah VII
1.03.10.2.01.0011	*Pemeliharaan Rutin Jalan*	7.416.315.000	3.152.352.000	42.51 %	25.00 %	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	Km	1.5	1.5	100.00 %	UPT Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah VIII

Dalam rangka evaluasi pelaksanaan renja tahun 2025 untuk meningkatkan kesadaran risiko di seluruh organisasi, Memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik, Membantu dalam perencanaan yang lebih efektif, Meningkatkan kemampuan organisasi untuk mengelola risiko berikut daftar Risk Register Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air tahun 2025

Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan

Nama Pemda	**: Pemerintah Kabupaten TANGERANG, Provinsi BANTEN**
Tahun Penilaian	**: 2025**
Tujuan Strategis	**: Meningkatkan Pemerataan Jaringan Jalan dan SDA**
Urusan Pemerintahan	**: BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
I	**Risiko Strategis**						
II	**Risiko Strategis**						
1	Volume kendaraan melebihi kapasitas Jalan Kabupaten	RSO.25.03.07.01	Melakukan koordinasi dengan OPD terkait mengenai penyusunan masterplan jalan	Kurangnya respon dari instansi terkait	Melakukan koordinasi lebih lanjut terkait masterplan jalan	DBMSDA	Triwulan IV
2	Adanya potensi daya rusak air yang dapat mengakibatkan penambahan titik banjir, erosi/sedimentasi dan tanah longsor	RSO.25.03.07.02	Melakukan penyusunan DED untuk menanggulangi atau mengendalikan Daya rusak air	Belum optimalnya pengadaan lahan untuk mendukung penanggulangan atau pengendalian daya rusak air	Melakuakn koordinasi lebih lanjut dengan instansi terkait	DBMSDA	Triwulan IV
3	Banyaknya Utilitas pada pekerjaan galian drainase disepanjang jalan	RSO.25.03.07.03	melaksanakan koordinasi antar instansi terkait mengenai rencana pelaksanaan kegiatan drainase	kurangnya respon dari instansi dan vendor terkait	melaksanakan koordinasi antar instansi terkait mengenai rencana pelaksanaan kegiatan drainase	DBMSDA	Triwulan IV
III	**Risiko Operasional**						
1	Ketidaksesuaian dokumen teknis perencanaan dengan pelaksanaan konstruksi	ROO.25.03.07.12	Melakukan penyesuaian dokumen perencanaan teknis sesuai dengan kondisi lapangan	Kemungkinan terdapat perbedaan item pekerjaan dan penambahan waktu pelaksanaan pekerjaan	Melakukan addendum kontrak sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lapangan saat pelaksanaan	Kepala Dinas EMSDA/ Bidang SDA	Triwulan IV
2	Ketidaksesuaian hasil akhir konstruksi dengan perencanaan jalan dan jembatan yang telah dibuat	ROO.25.03.07.01	Melakukan penyesuaian dokumen perencanaan teknis sesuai dengan kondisi lapangan	Kemungkinan terdapat perbedaan item pekerjaan dan penambahan waktu pelaksanaan pekerjaan	Menyusun kertas Kerja Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan sesuai standar dan pedoman yang berlaku	Kepala Dinas EMSDA/ Bidang Jalan Jembatan	Triwulan IV
3	Penundaan dalam proses desain menyebabkan keterlambatan entri data di Sirup	ROO.25.03.07.02	Melakuakn survei harga dengan konsultan untuk memperoleh harga yang diperlukan	terdapat perbedaan harga antara hasil survei konsultan dengan perbup SHS	Menyusun standar harga satuan (SHS) untuk urulan OPD terkait yang memiliki wewenang atas penetapan Perbup SHS	Kepala Dinas EMSDA/ Bidang Jalan Jembatan	Triwulan IV
4	Kecelakaan kerja	ROO.25.03.07.05	Menerapkan sistem menejemen Keselamatan Kesehatan Kerja (SMK3) dan melakukan pengawasan oleh pihak internal selama proses pekerjaan	Kurang koordinasi antara pengawas dengan pelaksana pekerjaan	Pemantauan rutin saat pelaksanaan pekerjaan serta memberikan surat teguran kepada pihak kontraktor pelaksana apabila tidak konsisten dalam penerapan K3	Kepala Dinas EMSDA/ Bidang Jalan Jembatan	Triwulan IV
5	Karena kurangnya identifikasi isu lingkungan pada survei awal	ROO.25.03.07.03	Melakukan dokumentasi pada saat survei	tidak teridentifikasi potensi perbedaan kondisi	Mendokumentasi secara rinci kondisi lapangan saat survey pendahuluan	Kepala Dinas EMSDA/ Bidang Jalan Jembatan	Triwulan IV
6	Ketidaksesuaian dokumen teknis perencanaan dengan pelaksanaan konstruksi	ROO.25.03.07.13	Melakukan pengawasan pekerjaan dengan lebih ketat dan teliti	Kemungkinan penyedia jasa tidak mengikuti arahan teknis pengawasan seluruhnya	Pengawas memastikan penyedia jasa membuat laporan harian, mingguan dan bulanan sesuai dengan realisasi pekerjaan yang sudah dicek/opname oleh pengawas	Kepala Dinas EMSDA/ Bidang SDA	Triwulan IV
7	Kecelakaan terjadi ketika survei perencanaan sedang dilakukan	ROO.25.03.07.04	Menerapkan sistem menejemen Keselamatan Kesehatan Kerja (SMK3) dan melakukan pengawasan oleh pihak internal selama proses pekerjaan	Kurang koordinasi antara pengawas dengan pelaksana pekerjaan	Pemantauan rutin saat pelaksanaan pekerjaan serta memberikan surat teguran kepada pihak kontraktor pelaksana apabila tidak konsisten dalam penerapan K3	Kepala Dinas EMSDA/ Bidang Jalan Jembatan	Triwulan IV
8	Kecelakaan kerja	ROO.25.03.07.14	Menerapkan sistem menejemen Keselamatan Kesehatan Kerja (SMK3) dan melakukan pengawasan oleh pihak internal selama proses pekerjaan	Kurang koordinasi antara pengawas dengan pelaksana pekerjaan	Pemantauan rutin saat pelaksanaan pekerjaan serta memberikan surat teguran kepada pihak kontraktor pelaksana apabila tidak konsisten dalam penerapan K3	Kepala Dinas EMSDA/ Bidang SDA	Triwulan IV
9	Pembayaran Honor Non ASN tidak dapat direalisasikan	ROO.25.03.07.17	Melakukan pendataan terhadap non ASN yang terdata di databse BKN dan yang tidak terdata di database BKN	Jumlah Non ASN	Melakukan pembayaran Honor Non ASN sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Kepala Dinas EMSDA/ Bidang Jalan dan Jembatan, Bidang SDA dan	Triwulan IV

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

3.1. PROGRAM DAN KEGIATAN

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Tangerang telah melakukan mapping program dan kegiatan pada Renstra 2024 – 2026 dalam rangka mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, Indikator kinerja pada program – program Tahun 2025 sebagai berikut :

a) Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

Untuk menilai keberhasilan pencapaian Program ini dapat diukur dengan indikator :

- Persentase Infrastruktur Sungai dan Pembuang dalam Kondisi Baik
- Prosentase Luas Lahan Sawah Dilindungi yang Terlayani Irigasi

b) Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase

Untuk menilai keberhasilan pencapaian Program ini dapat diukur dengan indikator :

- Persentase Infrastruktur Drainase yang Tertangani

c) Program Penyelenggaraan Jalan

Untuk menilai keberhasilan pencapaian Program ini dapat diukur dengan indikator :

- Persentase Peningkatan dan Rehabilitasi Jalan Kabupaten

d) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Untuk menilai keberhasilan pencapaian Program ini dapat diukur dengan indikator :

- Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan (DBMSDA)
- Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah (DBMSDA)

Pada pembahasan draft RPJMD 2025 - 2029 dan Draft Renstra 2025 - 2029 Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Tangerang untuk program rencana kerja masih memakai 3 Program urusan wajib dan 1 program urusan penunjang.

Berdasarkan indikator kinerja pada program tersebut dituangkan dalam program dan kegiatan yang direncanakan pada Perubahan anggaran tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 3.1
Program Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air Kabupaten Tangerang Tahun 2024

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM	RENJA PERUBAHAN (Rp)
1	2	3
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	
1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**	**583.765.028.789**
1.03.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	42.350.334.445
1.03.02	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	136.043.722.900
1.03.06	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	62.502.020.859
1.03.10	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	342.868.950.585

Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Tangerang pada Renja Perubahan Tahun 2024 mempunyai 4 Program terdiri dari 1 program SKPD yang menunjang sasaran 1 meningkatnya Kapasitas Kelembagaan dan 3 Program Wajib pelayanan dasar yang menunjang sasaran 2 Meningkatkan infrastruktur Sungai , Saluran Pembuang dan Daerah Irigasi dalam Kondisi baik, sasaran 3 Meningkatkan infrastruktur Jalan Kabupaten dalam Kondisi baik dan sasaran 4 Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Drainase. Untuk menunjang sasaran tersebut dituangkan dalam 4 Program, 11 Kegiatan dan 51 Sub Kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR KAB. TANGERANG
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR							**458.906.637.324,00**	**462.805.005.858,00**	**567.945.931.423,00**	**109.039.294.099,00**							**98.312.742,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**458.906.637.324,00**	**462.805.005.858,00**	**567.945.931.423,00**	**109.039.294.099,00**							**98.312.742,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							**458.906.637.324,00**	**462.805.005.858,00**	**567.945.931.423,00**	**109.039.294.099,00**							**98.312.742,00**	
1.	**1.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-				-	-	**40.779.749.741,00**	**42.722.664.982,51**	**42.675.103.327,51**	**-40.681.436.999,00**							**98.312.742,00**	
	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	310.147.450,00	261.139.450,00	209.117.450,00	-101.030.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		98.312.742,00	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	145.415.050,00	154.337.050,00	124.327.050,00	-21.088.000,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			98.312.742,00	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	15.992.000,00	15.992.000,00	16.394.000,00	402.000,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			0,00	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	5 Laporan	148.740.400,00	90.810.400,00	68.396.400,00	-80.344.000,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			0,00	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	34.498.049.791,00	36.234.001.562,51	36.986.780.907,51	2.488.731.116,51			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		0,00	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				147 Orang/ bulan	147 Orang/ bulan	34.388.102.741,00	36.124.054.512,51	36.877.493.857,51	2.489.391.116,51	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			0,00	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	109.947.050,00	109.947.050,00	109.287.050,00	-660.000,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			0,00	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	23.150.000,00	14.490.000,00	13.424.000,00	-9.726.000,00			-	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		0,00	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	23.150.000,00	14.490.000,00	13.424.000,00	-9.726.000,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			0,00	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	164.900.000,00	482.333.000,00	370.717.000,00	205.817.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		0,00	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				55 Orang	55 Orang	164.900.000,00	482.333.000,00	370.717.000,00	205.817.000,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			0,00	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	3.107.464.900,00	2.646.418.200,00	2.006.981.200,00	-1.100.483.700,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Administrasi Umum Perangkat Daerah		0,00	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				44 Paket	44 Paket	1.005.905.000,00	856.953.600,00	856.953.600,00	-148.951.400,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			0,00	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				46 Paket	46 Paket	217.223.900,00	209.548.800,00	209.548.800,00	-7.675.100,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			0,00	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				14 Paket	14 Paket	41.230.000,00	125.355.000,00	92.845.000,00	51.615.000,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			0,00	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				6000 Dokumen	6000 Dokumen	54.000.000,00	28.800.000,00	28.800.000,00	-25.200.000,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			0,00	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				300 Laporan	300 Laporan	214.600.000,00	214.600.000,00	143.440.000,00	-71.160.000,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			0,00	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100 Laporan	100 Laporan	1.574.506.000,00	1.211.160.800,00	675.393.800,00	-899.112.200,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			0,00	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	186.400.000,00	211.991.400,00	211.991.400,00	25.591.400,00			-	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		0,00	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				7 Unit	7 Unit	186.400.000,00	211.991.400,00	211.991.400,00	25.591.400,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			0,00	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	868.219.600,00	1.016.036.800,00	1.019.836.800,00	151.617.200,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		0,00	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1500 Laporan	1500 Laporan	33.534.000,00	33.534.000,00	33.534.000,00	0,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			0,00	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				20 Laporan	20 Laporan	255.377.600,00	272.118.800,00	272.118.800,00	16.741.200,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			0,00	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	579.308.000,00	710.384.000,00	714.184.000,00	134.876.000,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			0,00	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	1.621.418.000,00	1.856.254.570,00	1.856.254.570,00	234.836.570,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		0,00	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				50 Unit	50 Unit	1.317.218.000,00	1.503.537.840,00	1.503.537.840,00	186.319.840,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			0,00	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				9 Unit	9 Unit	110.500.000,00	121.000.000,00	121.000.000,00	10.500.000,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			0,00	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	193.700.000,00	231.716.730,00	231.716.730,00	38.016.730,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			0,00	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
2.	**1.03.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	-				-	-	**98.670.089.080,00**	**109.783.458.564,61**	**109.193.595.094,81**	**-98.670.089.080,00**							**0,00**	
	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	93.170.089.080,00	102.404.857.664,61	101.814.994.194,81	8.644.905.114,81			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan	Meningkatkan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		0,00	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.02.2.01.0013	Pembangunan Stasiun Pompa Banjir																		
			Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dibangun				5 Unit	3 Unit	5.000.000.000,00	3.499.999.039,00	3.222.915.644,20	-1.777.084.355,80	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan			0,00	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.02.2.01.0072	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota				100 Dokumen	100 Dokumen	100.000.000,00	199.999.640,00	83.915.410,00	-16.084.590,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan			0,00	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.02.2.01.0075	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan				10 Lembaga	10 Lembaga	100.000.000,00	1.100.000.100,00	1.042.585.000,00	942.585.000,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan			0,00	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.02.2.01.0078	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitasnya melalui Koordinasi dan Sinkronisasi				4 Lembaga	4 Lembaga	100.000.000,00	99.999.770,00	43.304.000,00	-56.696.000,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan			0,00	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.02.2.01.0079	Operasi dan Pemeliharaan Danau																		
			Jumlah Danau yang Dioperasikan dan Dipelihara				1 Danau	1 Danau	99.999.987,00	99.999.987,00	91.769.987,00	-8.230.000,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan			0,00	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.02.2.01.0093	Normalisasi/Restorasi Sungai																		
			Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi				9,7 KM	9,7 KM	27.000.000.000,00	5.817.287.900,00	5.768.147.900,00	-21.231.852.100,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan			0,00	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.02.2.01.0109	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing																		
			Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun				2 KM	2 KM	4.000.000.000,00	19.414.650.179,61	19.414.650.179,61	15.414.650.179,61	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan			0,00	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.02.2.01.0110	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing																		
			Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Direhabilitasi				0,5 KM	0,5 KM	500.000.000,00	955.246.700,00	955.246.700,00	455.246.700,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan			0,00	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.02.2.01.0115	Pembangunan Tanggul Sungai																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun				9,40 KM	9,40 KM	4.087.360.766,00	7.618.283.000,00	7.614.233.000,00	3.526.872.234,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan			0,00	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.02.2.01.0118	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	499.580.000,00	599.980.000,00	422.892.000,00	-76.688.000,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan			0,00	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.02.2.01.0120	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai																		
			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun				25 Dokumen	25 Dokumen	2.500.000.000,00	7.568.202.380,00	7.391.868.380,00	4.891.868.380,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan			0,00	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.02.2.01.0121	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya																		
			Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun				1 Unit	2 Unit	50.000.100,00	10.246.710.500,00	10.246.710.500,00	10.196.710.400,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan			0,00	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.02.2.01.0124	Pembangunan Polder/Kolam Retensi																		
			Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Dibangun				5 Unit	1 Unit	16.000.000.000,00	7.206.548.500,00	7.206.548.500,00	-8.793.451.500,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan			0,00	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.02.2.01.0125	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir																		
			Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Dibangun				10 Unit	2 Unit	1.600.000.000,00	443.023.500,00	443.023.500,00	-1.156.976.500,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan			0,00	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.02.2.01.0126	Rehabilitasi Tanggul Sungai																		
			Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi				1,5 KM	10,18 KM	1.050.000.000,00	1.935.081.900,00	1.935.081.900,00	885.081.900,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan			0,00	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	5.500.000.000,00	7.378.600.900,00	7.378.600.900,00	1.878.600.900,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan	Meningkatkan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		0,00	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.02.2.02.0002	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan																		
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun				1,5 KM	1,5 KM	4.500.000.000,00	6.179.700.900,00	6.179.700.900,00	1.679.700.900,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan			0,00	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.02.2.02.0035	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa																		
			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun				3 Dokumen	3 Dokumen	1.000.000.000,00	1.198.900.000,00	1.198.900.000,00	198.900.000,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan			0,00	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
3.	**1.03.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	-				-	-	**68.943.871.081,00**	**51.951.349.501,00**	**51.642.895.890,80**	**-68.943.871.081,00**							**0,00**	
	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	68.943.871.081,00	51.951.349.501,00	51.642.895.890,80	-17.300.975.190,20			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan	Meningkatkan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota		0,00	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.06.2.01.0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan																		
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun				8800 Sistem Drainase Perkotaan	8800 Sistem Drainase Perkotaan	16.443.871.406,00	25.671.607.102,00	25.528.579.102,00	9.084.707.696,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan			0,00	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.06.2.01.0030	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan																		
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun				45 Dokumen	45 Dokumen	30.500.000.000,00	6.640.046.400,00	6.501.377.400,00	-23.998.622.600,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan			0,00	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.06.2.01.0031	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan																		
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara				70000 Sistem Drainase Perkotaan	70000 Sistem Drainase Perkotaan	5.500.000.000,00	3.139.821.000,00	3.031.821.000,00	-2.468.179.000,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan			0,00	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
4.	**1.03.10**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	-				-	-	**250.512.927.422,00**	**258.347.532.809,88**	**364.434.337.109,88**	**-250.512.927.422,00**							**0,00**	
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	-				-	-	250.512.927.422,00	258.347.532.809,88	364.434.337.109,88	113.921.409.687,88			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan	Meningkatkan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota		0,00	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.10.2.01.0028	Pengelolaan Leger Jalan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola				20 Dokumen	20 Dokumen	27.200.000.000,00	3.185.959.200,00	2.940.356.800,00	-24.259.643.200,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan			0,00	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan																		
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun				20 Dokumen	20 Dokumen	27.200.000.000,00	6.016.333.632,64	6.093.949.632,64	-21.106.050.367,36	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan			0,00	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.10.2.01.0031	Penggantian Jembatan																		
			Jumlah Jembatan yang Diganti				5 Jembatan	10 Jembatan	9.200.000.000,00	21.640.137.400,00	21.640.137.400,00	12.440.137.400,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan			0,00	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan																		
			Panjang Jalan yang Dibangun				0,75 KM	9,83 KM	2.500.001.750,00	24.014.036.150,00	123.771.159.350,00	121.271.157.600,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan			0,00	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.10.2.01.0033	Rekonstruksi Jalan																		
			Panjang Jalan yang Direkonstruksi				7,5 KM	11,85 KM	66.000.000.000,00	67.823.276.762,22	72.623.276.762,22	6.623.276.762,22	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) DBH SAWIT	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan			0,00	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.10.2.01.0037	Pelebaran Jalan Menuju Standar																		
			Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar				0,5 KM	1,50 KM	3.150.000.000,00	3.150.000.000,00	3.150.000.000,00	0,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan			0,00	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.10.2.01.0040	Pembangunan Jembatan																		
			Jumlah Jembatan yang Dibangun				1 Jembatan	21 Jembatan	10.497.926.000,00	15.141.348.200,00	15.141.348.200,00	4.643.422.200,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan			0,00	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya				2 KM	2 KM	659.999.672,00	859.999.990,00	670.194.990,00	10.195.318,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan Infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan Industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Pembangunan Intrastruktur Berwawasan Lingkungan			0,00	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.10.2.01.0044	Rehabilitasi Jalan																		
			Panjang Jalan yang Direhabilitasi				7.5 KM	8.95 KM	54.500.000.000,00	54.242.723.625,00	57.242.723.625,00	2.742.723.625,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) OPSEN PKB	Melanjutkan pengembangan Infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan Industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Pembangunan Intrastruktur Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Pembangunan Intrastruktur Berwawasan Lingkungan			0,00	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
		UPT PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH I							**458.906.637.324,00**	**462.805.005.858,00**	**567.945.931.423,00**	**109.039.294.099,00**							**98.312.742,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**458.906.637.324,00**	**462.805.005.858,00**	**567.945.931.423,00**	**109.039.294.099,00**							**98.312.742,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							**458.906.637.324,00**	**462.805.005.858,00**	**567.945.931.423,00**	**109.039.294.099,00**							**98.312.742,00**	
1.	**1.03.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	-				-	-	**98.670.089.080,00**	**109.783.458.564,61**	**109.193.595.094,81**	**-98.670.089.080,00**							**0,00**	
	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	93.170.089.080,00	102.404.857.664,61	101.814.994.194,81	8.644.905.114,81			Melanjutkan pengembangan Infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan Industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Pembangunan Intrastruktur Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Pembangunan Intrastruktur Berwawasan Lingkungan	Meningkatkan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		0,00	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.02.2.01.0073	Operasi dan Pemeliharaan Sungai																		
			Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara				25 KM	25 KM	3.319.936.469,00	3.619.936.469,00	3.609.436.469,00	289.500.000,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan Infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan Industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Pembangunan Intrastruktur Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Pembangunan Intrastruktur Berwawasan Lingkungan			0,00	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
		UPT PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH II							**458.906.637.324,00**	**462.805.005.858,00**	**567.945.931.423,00**	**109.039.294.099,00**							**98.312.742,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**458.906.637.324,00**	**462.805.005.858,00**	**567.945.931.423,00**	**109.039.294.099,00**							**98.312.742,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							**458.906.637.324,00**	**462.805.005.858,00**	**567.945.931.423,00**	**109.039.294.099,00**							**98.312.742,00**	
1.	**1.03.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	-				-	-	**98.670.089.080,00**	**109.783.458.564,61**	**109.193.595.094,81**	**-98.670.089.080,00**							**0,00**	
	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	93.170.089.080,00	102.404.857.664,61	101.814.994.194,81	8.644.905.114,81			Melanjutkan pengembangan Infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan Industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Pembangunan Intrastruktur Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Pembangunan Intrastruktur Berwawasan Lingkungan	Meningkatkan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		0,00	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.02.2.01.0073	Operasi dan Pemeliharaan Sungai																		
			Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara				22 KM	22 KM	4.239.999.734,00	5.239.999.555,00	5.273.171.555,00	1.033.171.821,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan Infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan Industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Pembangunan Intrastruktur Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Pembangunan Intrastruktur Berwawasan Lingkungan			0,00	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
		UPT PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH III							**458.906.637.324,00**	**462.805.005.858,00**	**567.945.931.423,00**	**109.039.294.099,00**							**98.312.742,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**458.906.637.324,00**	**462.805.005.858,00**	**567.945.931.423,00**	**109.039.294.099,00**							**98.312.742,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							**458.906.637.324,00**	**462.805.005.858,00**	**567.945.931.423,00**	**109.039.294.099,00**							**98.312.742,00**	
1.	**1.03.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	-				-	-	**98.670.089.080,00**	**109.783.458.564,61**	**109.193.595.094,81**	**-98.670.089.080,00**							**0,00**	
	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	93.170.089.080,00	102.404.857.664,61	101.814.994.194,81	8.644.905.114,81			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan	Meningkatkan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		0,00	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.02.2.01.0073	Operasi dan Pemeliharaan Sungai																		
			Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara				7 KM	7 KM	3.098.367.870,00	3.398.367.500,00	3.399.525.500,00	301.157.630,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan			0,00	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
		UPT PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH IV							**458.906.637.324,00**	**462.805.005.858,00**	**567.945.931.423,00**	**109.039.294.099,00**							**98.312.742,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**458.906.637.324,00**	**462.805.005.858,00**	**567.945.931.423,00**	**109.039.294.099,00**							**98.312.742,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							**458.906.637.324,00**	**462.805.005.858,00**	**567.945.931.423,00**	**109.039.294.099,00**							**98.312.742,00**	
1.	**1.03.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	-				-	-	**98.670.089.080,00**	**109.783.458.564,61**	**109.193.595.094,81**	**-98.670.089.080,00**							**0,00**	
	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	93.170.089.080,00	102.404.857.664,61	101.814.994.194,81	8.644.905.114,81			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan	Meningkatkan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		0,00	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.02.2.01.0073	Operasi dan Pemeliharaan Sungai																		
			Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara				32 KM	32 KM	4.166.934.255,00	4.470.423.151,00	4.519.623.151,00	352.688.896,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan			0,00	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
		UPT PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH V							**458.906.637.324,00**	**462.805.005.858,00**	**567.945.931.423,00**	**109.039.294.099,00**							**98.312.742,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**458.906.637.324,00**	**462.805.005.858,00**	**567.945.931.423,00**	**109.039.294.099,00**							**98.312.742,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							**458.906.637.324,00**	**462.805.005.858,00**	**567.945.931.423,00**	**109.039.294.099,00**							**98.312.742,00**	
1.	**1.03.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	-				-	-	**98.670.089.080,00**	**109.783.458.564,61**	**109.193.595.094,81**	**-98.670.089.080,00**							**0,00**	
	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	93.170.089.080,00	102.404.857.664,61	101.814.994.194,81	8.644.905.114,81			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan	Meningkatkan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		0,00	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.02.2.01.0073	Operasi dan Pemeliharaan Sungai																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara				44,42 KM	44,42 KM	4.349.950.000,00	5.463.212.600,00	5.504.192.600,00	1.154.242.600,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Pembangunan Intrastruktur Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Pembangunan Intrastruktur Berwawasan Lingkungan			0,00	
		UPT PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH VI							**458.906.637.324,00**	**462.805.005.858,00**	**567.945.931.423,00**	**109.039.294.099,00**							**98.312.742,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**458.906.637.324,00**	**462.805.005.858,00**	**567.945.931.423,00**	**109.039.294.099,00**							**98.312.742,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							**458.906.637.324,00**	**462.805.005.858,00**	**567.945.931.423,00**	**109.039.294.099,00**							**98.312.742,00**	
1.	**1.03.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	-				-	-	**98.670.089.080,00**	**109.783.458.564,61**	**109.193.595.094,81**	**-98.670.089.080,00**							**0,00**	
	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	93.170.089.080,00	102.404.857.664,61	101.814.994.194,81	8.644.905.114,81			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Pembangunan Intrastruktur Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Pembangunan Intrastruktur Berwawasan Lingkungan	Meningkatkan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		0,00	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.02.2.01.0073	Operasi dan Pemeliharaan Sungai																		
			Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara				33,50 KM	33,50 KM	4.543.550.000,00	5.943.550.000,00	6.135.450.000,00	1.591.900.000,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Pembangunan Intrastruktur Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Pembangunan Intrastruktur Berwawasan Lingkungan			0,00	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
		UPT PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH VII							**458.906.637.324,00**	**462.805.005.858,00**	**567.945.931.423,00**	**109.039.294.099,00**							**98.312.742,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**458.906.637.324,00**	**462.805.005.858,00**	**567.945.931.423,00**	**109.039.294.099,00**							**98.312.742,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							**458.906.637.324,00**	**462.805.005.858,00**	**567.945.931.423,00**	**109.039.294.099,00**							**98.312.742,00**	
1.	**1.03.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	-				-	-	**98.670.089.080,00**	**109.783.458.564,61**	**109.193.595.094,81**	**-98.670.089.080,00**							**0,00**	
	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	93.170.089.080,00	102.404.857.664,61	101.814.994.194,81	8.644.905.114,81			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Pembangunan Intrastruktur Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Pembangunan Intrastruktur Berwawasan Lingkungan	Meningkatkan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		0,00	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.02.2.01.0073	Operasi dan Pemeliharaan Sungai																		
			Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara				8 KM	8 KM	3.502.451.896,00	3.802.397.599,00	3.798.384.624,00	295.932.728,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Pembangunan Intrastruktur Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Pembangunan Intrastruktur Berwawasan Lingkungan			0,00	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
		UPT PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH VIII							**458.906.637.324,00**	**462.805.005.858,00**	**567.945.931.423,00**	**109.039.294.099,00**							**98.312.742,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**458.906.637.324,00**	**462.805.005.858,00**	**567.945.931.423,00**	**109.039.294.099,00**							**98.312.742,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							**458.906.637.324,00**	**462.805.005.858,00**	**567.945.931.423,00**	**109.039.294.099,00**							**98.312.742,00**	
1.	**1.03.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	-				-	-	**98.670.089.080,00**	**109.783.458.564,61**	**109.193.595.094,81**	**-98.670.089.080,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	93.170.089.080,00	102.404.857.664,61	101.814.994.194,81	8.644.905.114,81			Melanjutkan pengembangan Infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan Industri kreatif serta mengembangkan agromaritim Industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan	Meningkatkan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		0,00	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.02.2.01.0073	Operasi dan Pemeliharaan Sungai																		
			Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara				15 KM	15 KM	3.261.958.003,00	3.661.957.695,00	3.692.317.695,00	430.359.692,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan Infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan Industri kreatif serta mengembangkan agromaritim Industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan			0,00	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
		UPT PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH I							**458.906.637.324,00**	**462.805.005.858,00**	**567.945.931.423,00**	**109.039.294.099,00**							**98.312.742,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**458.906.637.324,00**	**462.805.005.858,00**	**567.945.931.423,00**	**109.039.294.099,00**							**98.312.742,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							**458.906.637.324,00**	**462.805.005.858,00**	**567.945.931.423,00**	**109.039.294.099,00**							**98.312.742,00**	
1.	**1.03.10**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	-				-	-	**250.512.927.422,00**	**258.347.532.809,88**	**364.434.337.109,88**	**-250.512.927.422,00**							**0,00**	
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	-				-	-	250.512.927.422,00	258.347.532.809,88	364.434.337.109,88	113.921.409.687,88			Melanjutkan pengembangan Infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan Industri kreatif serta mengembangkan agromaritim Industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan	Meningkatkan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota		0,00	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan																		
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin				4,85 KM	4,85 KM	5.900.000.000,00	7.750.000.000,00	7.584.850.000,00	1.684.850.000,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan Infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan Industri kreatif serta mengembangkan agromaritim Industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan			0,00	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
		UPT PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH II							**458.906.637.324,00**	**462.805.005.858,00**	**567.945.931.423,00**	**109.039.294.099,00**							**98.312.742,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**458.906.637.324,00**	**462.805.005.858,00**	**567.945.931.423,00**	**109.039.294.099,00**							**98.312.742,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							**458.906.637.324,00**	**462.805.005.858,00**	**567.945.931.423,00**	**109.039.294.099,00**							**98.312.742,00**	
1.	**1.03.10**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	-				-	-	**250.512.927.422,00**	**258.347.532.809,88**	**364.434.337.109,88**	**-250.512.927.422,00**							**0,00**	
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	-				-	-	250.512.927.422,00	258.347.532.809,88	364.434.337.109,88	113.921.409.687,88			Melanjutkan pengembangan Infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan Industri kreatif serta mengembangkan agromaritim Industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan	Meningkatkan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota		0,00	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan																		
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin				4,35 KM	4,35 KM	6.000.000.000,00	7.500.000.000,00	7.376.352.000,00	1.376.352.000,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan Infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan Industri kreatif serta mengembangkan agromaritim Industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan			0,00	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
		UPT PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH III							**458.906.637.324,00**	**462.805.005.858,00**	**567.945.931.423,00**	**109.039.294.099,00**							**98.312.742,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							458.906.637.324,00	462.805.005.858,00	567.945.931.423,00	109.039.294.099,00							98.312.742,00	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							458.906.637.324,00	462.805.005.858,00	567.945.931.423,00	109.039.294.099,00							98.312.742,00	
1.	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	-				-	-	250.512.927.422,00	258.347.532.809,88	364.434.337.109,88	-250.512.927.422,00							0,00	
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	-				-	-	250.512.927.422,00	258.347.532.809,88	364.434.337.109,88	113.921.409.687,88			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan Industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan	Meningkatkan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota		0,00	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan																		
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin				6,75 KM	6,75 KM	6.500.000.000,00	7.918.717.850,02	7.830.250.350,02	1.330.250.350,02	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan Industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan			0,00	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
		UPT PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH IV							458.906.637.324,00	462.805.005.858,00	567.945.931.423,00	109.039.294.099,00							98.312.742,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							458.906.637.324,00	462.805.005.858,00	567.945.931.423,00	109.039.294.099,00							98.312.742,00	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							458.906.637.324,00	462.805.005.858,00	567.945.931.423,00	109.039.294.099,00							98.312.742,00	
1.	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	-				-	-	250.512.927.422,00	258.347.532.809,88	364.434.337.109,88	-250.512.927.422,00							0,00	
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	-				-	-	250.512.927.422,00	258.347.532.809,88	364.434.337.109,88	113.921.409.687,88			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan Industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan	Meningkatkan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota		0,00	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan																		
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin				6,17 KM	6,17 KM	6.500.000.000,00	8.400.000.000,00	8.202.632.500,00	1.702.632.500,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan Industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan			0,00	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
		UPT PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH V							458.906.637.324,00	462.805.005.858,00	567.945.931.423,00	109.039.294.099,00							98.312.742,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							458.906.637.324,00	462.805.005.858,00	567.945.931.423,00	109.039.294.099,00							98.312.742,00	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							458.906.637.324,00	462.805.005.858,00	567.945.931.423,00	109.039.294.099,00							98.312.742,00	
1.	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	-				-	-	250.512.927.422,00	258.347.532.809,88	364.434.337.109,88	-250.512.927.422,00							0,00	
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	-				-	-	250.512.927.422,00	258.347.532.809,88	364.434.337.109,88	113.921.409.687,88			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan Industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan	Meningkatkan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota		0,00	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin				5,33 KM	5,33 KM	6.540.000.000,00	8.040.000.000,00	7.915.447.500,00	1.375.447.500,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan			0,00	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
		UPT PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH VI							**458.906.637.324,00**	**462.805.005.858,00**	**567.945.931.423,00**	**109.039.294.099,00**							**98.312.742,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**458.906.637.324,00**	**462.805.005.858,00**	**567.945.931.423,00**	**109.039.294.099,00**							**98.312.742,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							**458.906.637.324,00**	**462.805.005.858,00**	**567.945.931.423,00**	**109.039.294.099,00**							**98.312.742,00**	
1.	**1.03.10**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	-				-	-	**250.512.927.422,00**	**258.347.532.809,88**	**364.434.337.109,88**	**-250.512.927.422,00**							**0,00**	
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	-				-	-	250.512.927.422,00	258.347.532.809,88	364.434.337.109,88	113.921.409.687,88			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan	Meningkatkan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota		0,00	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan																		
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin				6,58 KM	6,58 KM	6.215.000.000,00	7.715.000.000,00	7.549.802.000,00	1.334.802.000,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan			0,00	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
		UPT PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH VII							**458.906.637.324,00**	**462.805.005.858,00**	**567.945.931.423,00**	**109.039.294.099,00**							**98.312.742,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**458.906.637.324,00**	**462.805.005.858,00**	**567.945.931.423,00**	**109.039.294.099,00**							**98.312.742,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							**458.906.637.324,00**	**462.805.005.858,00**	**567.945.931.423,00**	**109.039.294.099,00**							**98.312.742,00**	
1.	**1.03.10**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	-				-	-	**250.512.927.422,00**	**258.347.532.809,88**	**364.434.337.109,88**	**-250.512.927.422,00**							**0,00**	
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	-				-	-	250.512.927.422,00	258.347.532.809,88	364.434.337.109,88	113.921.409.687,88			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan	Meningkatkan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota		0,00	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan																		
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin				4,86 KM	4,86 KM	5.950.000.000,00	7.450.000.000,00	7.285.541.000,00	1.335.541.000,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan			0,00	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
		UPT PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH VIII							**458.906.637.324,00**	**462.805.005.858,00**	**567.945.931.423,00**	**109.039.294.099,00**							**98.312.742,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**458.906.637.324,00**	**462.805.005.858,00**	**567.945.931.423,00**	**109.039.294.099,00**							**98.312.742,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							**458.906.637.324,00**	**462.805.005.858,00**	**567.945.931.423,00**	**109.039.294.099,00**							**98.312.742,00**	
1.	**1.03.10**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	-				-	-	**250.512.927.422,00**	**258.347.532.809,88**	**364.434.337.109,88**	**-250.512.927.422,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	-				-	-	250.512.927.422,00	258.347.532.809,88	364.434.337.109,88	113.921.409.687,88			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan	Meningkatkan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota		0,00	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan																		
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin				4,55 KM	4,55 KM	6.000.000.000,00	7.500.000.000,00	7.416.315.000,00	1.416.315.000,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan			0,00	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
		UPT PERALATAN DAN PERBENGKELAN							**458.906.637.324,00**	**462.805.005.858,00**	**567.945.931.423,00**	**109.039.294.099,00**							**98.312.742,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**458.906.637.324,00**	**462.805.005.858,00**	**567.945.931.423,00**	**109.039.294.099,00**							**98.312.742,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							**458.906.637.324,00**	**462.805.005.858,00**	**567.945.931.423,00**	**109.039.294.099,00**							**98.312.742,00**	
1.	**1.03.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	-				-	-	**68.943.871.081,00**	**51.951.349.501,00**	**51.642.895.890,80**	**-68.943.871.081,00**							**0,00**	
	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	68.943.871.081,00	51.951.349.501,00	51.642.895.890,80	-17.300.975.190,20			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan	Meningkatkan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota		0,00	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.06.2.01.0026	Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan																		
			Jumlah Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan yang Disediakan				30 Unit	30 Unit	16.499.999.675,00	16.499.874.999,00	16.581.118.388,80	81.118.713,80	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan			0,00	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
		J U M L A H							**458.906.637.324,00**	**462.805.005.858,00**	**567.945.931.423,00**	**109.039.294.099,00**							**98.312.742,00**	

IV
PENUTUP

4.1 CATATAN-CATATAN

Demikian Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Tangerang Tahun 2025 ini diharapkan akan menjadi acuan bagi seluruh jajaran Stakeholder Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Tangerang dalam melaksanakan kegiatan.

Selain itu diharapkan pula Rencana Kerja (Renja) ini dapat dijadikan Sumber Informasi bagi Instansi terkait dalam merealisasikan kegiatan di lapangan. Namun walaupun demikian kiranya RENJA Perubahan Tahun 2025 ini dapat mendorong Keberhasilan Pencapaian Visi dan Misi Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Tangerang.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Rencana Kerja (Renja) Perubahan 2025 Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Tangerang dapat menjadi acuan dan pedoman bagi seluruh penyelenggara pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, sehingga hasilnya dinikmati dan dirasakan secara lebih merata, adil dan tumbuh rasa kepuasan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Tangerang.

4.2 KAIDAH – KAIDAH PELAKSANAAN

Kaidah-kaidah pelaksanaan Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air tahun 2025 sebagai berikut:

1. Di dalam Penyusunan Renja Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Tahun 2025 memerlukan waktu dikarenakan harus menyesuaikan dengan Draft RPJMD Kabupaten Tangerang 2025-2029 dan Draft Renstra Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Tangerang 2025 - 2029 serta astacita Bupati Tangerang Periode 2025-2030
2. Rencana Kerja Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Tahun 2025 dalam upaya Sinkronisasi dan Sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi Banten maupun yang bersumber dari APBN, harus memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada diatasnya diantaranya (RKP, RPJMN, RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi, RKPD Provinsi, RPJP Kabupaten, RPJMD Kabupaten, RKPD Kabupaten Tangerang dan Renstra Dinas).

4.3. RENCANA TINDAK LANJUT

1. Perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur perencanaan untuk melaksanakan tugas perencanaan yang semakin komplek. Upaya yang harus ditempuh dapat melalui pendidikan formal, bintek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur perencana.
2. Aparatur perencana yang ada saat ini dari sisi kuantitas masih kurang, hal tersebut akan berakibat bertumpuknya suatu pekerjaan pada seseorang.

3. Menerapkan sistem reward and punishment terhadap seluruh pegawai dan mengaplikasikannya pada pendistribusian insentif berdasarkan beban kerja.
4. Dalam rangka sinergitas perencanaan harus lebih intensif di dalam melaksanakan koordinasi dengan OPD, agar proses pembangunan yang dilaksanakan agar berdaya guna dan berhasil guna
5. Meningkatkan peran serta masyarakat, baik dalam proses perencanaan maupun penganggaran, sehingga transparansi akan lebih terwujud.
6. Dalam menetapkan dokumen perencanaan harus tepat waktu sesuai dengan amanat peraturan perundangan yang berlaku, hal ini dapat dilaksanakan apabila kita mengacu jadwal yang telah ditetapkan.

11. Dinas Tata Ruang dan Bangunan

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kabupaten Tangerang adalah bagian dari dokumen perencanaan Dinas Tata Ruang dan Bangunan untuk persiapan periode satu tahun yang pada dasarnya merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPD) Kabupaten Tangerang.

Proses penyusunan RENJA - P 2025 ini dilakukan untuk prioritas tahun rencana serta analisis isu strategis dan prioritas Pembangunan Daerah untuk tahun yang direncanakan.

Secara normatif, di dalam aturan yang mengatur penyusunan RENJA - P dinyatakan bahwa Rencana Kerja Perubahan Tahunan yang selanjutnya disebut RENJA - P adalah dokumen yang disusun melalui urutan kegiatan penyiapan rancangan rencana pembangunan; musyawarah perencanaan pembangunan dan penyusunan rancangan rencana pembangunan.

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang terarah dan aspiratif perencanaan pembangunan dilakukan dengan mengedepankan aspirasi dari masyarakat melalui kegiatan Musrenbang Kecamatan. Dari hasil kegiatan ini maka ditetapkan program dan sasaran strategis pembangunan.

Dengan Rencana Kerja ini diharapkan dapat dijadikan pedoman dan alat ukur pencapaian kinerja pembangunan dan pemecahan masalah pembangunan di Kabupaten Tangerang.

Rencana Kerja Perubahan Dinas Tata Ruang dan Bangunan merupakan suatu penjabaran dari Tujuan, Sasaran dan Program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategi (RENSTRA) yang disusun sesuai dengan program Pemerintah Kabupaten Tangerang yang telah dicanangkan untuk kurun waktu tahun 2024-2026 yang membawa visi **"Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Tangerang Yang Religius, Cerdas, Sehat, dan Sejahtera".**

Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kabupaten Tangerang sebagai salah satu unit Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Kabupaten Tangerang yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 02 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang pada Pemerinah Kabupaten Tangerang.

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Program Kerja Sekretaris Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kabupaten Tangerang yang menjadi landasan hukumnya adalah sebagai berikut :

1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3) Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa;
4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan;
7) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
8) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.
9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14) Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Rencana`Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tangerang Tahun 2005-2025;
15) Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 02 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang;
16) Peraturan Bupati Tangerang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 20 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kabupaten Tangerang.

1.3 Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2025

Perencanaan pembangunan Kabupaten Tangerang Tahun 2025 dilaksanakan secara sinergis, berkesinambungan dan sesuai ketentuan yang berlaku sebagai berikut:

1. Mempedomani RPJPD Kabupaten Tangerang Tahun 2005-2025;
2. Memperhatikan sasaran dan prioritas pembangunan Nasional Tahun 2025;

3. Memperhatikan sasaran dan prioritas pembangunan Provinsi Banten Tahun 2025;
4. Memperhatikan capaian kinerja Tahun 2024 dan rencana target capaian Tahun 2025;
5. Memperhatikan dan mengantisipasi perkembangan dinamika lingkungan strategis internal maupun eksternal.
6. Memperhatikan indikator dan target pencapaian Standar Pelayanan Minimal dan Sustainable Development Goals Tahun 2016-2030

Arah Kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2025, adalah sebagai berikut:

1. Pemantapan perilaku spritualitas masyarakat dengan menjaga ketertiban masyarakat dan kehidupan beragama
2. Pemantapan kualitas pendidikan, kesehatan masyarakat, serta pengarusutamaan gender
3. Pemantapan kualitas produktivitas tenaga kerja yang unggul dan berdaya saing
4. Penguatan dan pemantapan kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan akuntabel.
5. Pemerataan Infrastruktur Wilayah yang berkualitas
6. Penguatan dan pemantapan budaya inovasi daerah untuk mengembangkan ekonomi berbasis sumber daya local

1.4 PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2025

1.4.1 Sasaran Pembangunan Kabupaten Tangerang Tahun 2025
Sasaran dan target makro pembangunan Kabupaten Tangerang Tahun 2025, yaitu sebagai berikut :

1) Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tangerang Tahun 2025 ditargetkan sebesar 5 ,47 % dengan asumsi adanya kebijakan meningkatkan arus investasi di daerah, perluasan dan pemerataan pembangunan infrastruktur; pengembangan kawasan industri yang semakin berdaya saing dan terintegrasi dengan sentra - sentra produksi; kemudahan ijin usaha serta penciptaan iklim usaha yang kondusif.

2) Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi 73,26 dengan meningkatkan kualitas pendidikan termasuk pendidikan karakter, perluasan dan pemerataan akses dan sarana prasarana pelayanan kesehatan, penanganan masalah kesejahteraan secara terpadu serta pemberdayaan kelompok masyarakat rentan, yang didukung dengan pemenuhan peningkatan kualitas infrastruktur dan pelayanan dasar.

3) Percepatan penurunan tingkat kemiskinan menjadi 6 ,5% pada Tahun 2025 yang didukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inflasi yang terkendali melalui pengurangan beban pengeluaran dan peningkatan pendapatan masyarakat miskin, keterpaduan dan perluasan intervensi program/kegiatan yang mengutamakan pada wilayah dengan sasaran prioritas serta

peningkatan dan keberlanjutan program-program perlindungan sosial berbasis keluarga

4) Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka menjadi 8 ,3% pada Tahun 2025 melalui peningkatan kapasitas dan produktivitas tenaga kerja dengan akselerasi penyerapan tenaga kerja dan pengembangan lapangan kerja baru terutama lapangan kerja produktif, penguatan regulasi dan iklim yang kondusif untuk peningkatan investasi; perbaikan iklim ketenagakerjaan,

penguatan hubungan industrial serta perlindungan terhadap tenaga kerja.

1.4.2 Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Tangerang Tahun 2025 Isu strategis pembangunan Kabupaten Tangerang Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1) Sumber Daya Manusia yang perlu ditingkatkan yang diperkuat dengan produktivitas Usaha Mikro dan ekonomi kreatif serta peningkatan kesempatan kerja
2) Peningkatan infrastruktur Wilayah dan Lingkungan Hidup Perlunya peningkatan pelayanan infrastruktur dasar maupun penunjang perekonomian masyarakat dan upaya pengurangan
3) kesenjangan antar wilayah dengan memperhatikan kualitas lingkungan hidup
4) Tata Kelola Pemerintahan Masih perlunya peningkatan pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dalam rangka mendukung perwujudan reformasi birokrasi.
5) Prioritas Pembangunan Kabupaten Tangerang Tahun 2025

Prioritas pembangunan daerah tahun 2025 mendasarkan pada kebijakan pembangunan dalam RPJMD Tahun 2024-2026. Dalam BAB VI RPJMD Tahun 2024-2026 disebutkan bahwa arah kebijakan pembangunan Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026 berfungsi sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dan instansi terkait lainnya dalam merumuskan kebijakan dan program sesuai dengan fungsi dan tugas pokok masing- masing. Mengacu pada permasalahan dan isu daerah tahun 2025 maka tema pembangunan Kabupaten Tangerang Tahun 2025 adalah

“PEMERATAAN PEMBANGUNAN BERWAWASAN LINGKUNGAN DALAM UPAYA PENINGKATAN DAYA SAING DAERAH MELALUI KOLABORASI ANTAR SEKTOR ”

Adapun prioritas pembangunan yang diambil Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kabupaten Tangerang adalah sebagai berikut :

Prioritas Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan, fokus pada :

a. Kota dan Permukiman Layak
    - Optimalisasi Bangunan yang sesuai dengan ketentuan pemanfaatan ruang
    - Meningkatnya Data sektoral untuk mendukung penataan ruang
    - Meningkatnya bangunan yang sesuai dengan izin yang diperoleh
    - Meningkatnya pemanfaatan kawasan kawasan bangunan dan fasilitasi publik
    - Meningkatnya konsep penataan bangunan dan lingkungan yang terintegrasi

b. Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, focus pada :

- ✓ Pelayanan Publik yang berkualitas
  - Digitalisasi dan Integrasi Pelayanan Publik
  - Penyediaan Sarana dan Prasarana
- ✓ Peningkatan Nilai SAKIP OPD
- ✓ Peningkatan Nilai MCP
- ✓ Peningkatan Kapasitas ASN
  - Pemagangan dan Sertifikasi ASN
- ✓ Meningkatnya Indeks SPBE

1.5 Maksud dan Tujuan

1) Maksud

Maksud disusunnya Rencana Kerja Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kabupaten Tangerang ini adalah agar program dan kegiatan Dinas Tata Ruang dan Bangunan dapat dievaluasi lebih dini, apakah telah mengacu kepada Rancangan RKPD maupun Renstra Dinas Tata Ruang dan Bangunan, apakah menerapkan program/ kegiatan lanjutan dari periode sebelumnya atau kegiatan baru. Lebih jauh apakah program/ kegiatan telah selaras dengan keinginan/usulan dari masyarakat.

2) Tujuan

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Tata Ruang dan Bangunan adalah untuk mempertajam indikator serta target program dan kegiatan Dinas Tata Ruang dan Bangunan, mengoptimalkan pencapaian sasaran untuk mensinergikan dengan pelaksanaan prioritas Pembangunan Daerah serta menyesuaikan pendanaan program/ kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing OPD.

1.6 Sistematika Penyusunan

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2025
- 1.4 Prioritas Pembangunan Tahun 2025
- 1.5 Maksud dan Tujuan
- 1.6 Sistematika Penyusunan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2024
- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2024
- 2.2 Analisa Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
- 2.4 Rancangan Pagu Anggaran Dinas Tata Ruang dan Bangunan Tahun 2025

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Tata Ruang dan Bangunan
3.2 Program dan Kegiatan OPD Tahun 2025
BAB IV PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS TATA RUANG DAN BANGUNAN KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Capaian Renstra Dinas Tata Ruang dan Bangunan

Mengacu pada rencana strategis Tahun 2024-2026 serta rencana kerja tahunan. Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kabupaten Tangerang Tahun 2024 berdasarkan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020, Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021, Permendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023, dan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024. tentang Klasifikasi, Kodesifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah melaksanakan 4 Program 14 Kegiatan dan 54 Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Tata Ruang dan Bangunan. Evaluasi pelaksnaan rencana kerja Dinas Tata Ruang dan Bangunan. Evaluasi pelaksanaan rencana kerja Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kabupaten Tangerangdapat dilihat seperti dibawah.

Evaluasi Pelaksanaan Renja digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan sasaran target program dan kegiatan yang telah ditetapkan guna mewujudkan tujuan yang ditetapkan.

Evaluasi Renja dilakukan dengan menggunakan metode komparasi perbandingan antara rencana kerja dengan realisasi kinerja yang dicapai organisasi. Setelah itu, akan dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja yang terjadi serta tindkaan perbaikan yang dilakukan dimasa mendatang.

Sesuai Sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa setiap dokumen Perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Evaluasi Rencana Kerja Dinas Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kabupaten Tangerang mencakup 3 (tiga) hal yaitu:

1. Perencanaan Program dan Kegiatan
2. Pelaksanaan Program dan Kegiatan
3. Hasil Program dan Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Daerah Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategis Rencana Kerja Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kabupaten Tangerang adalah penjabaran rencana kerja tahunan yang dilaksanakan oleh Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kabupaten Tangerang sebagai pelaksana urusan penataan ruang dan bangunan.

Berikut Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kabupaten Tangerang sampai dengan Semester II 2024:

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Capaian (%)	Realisasi Fisik Kegiatan (%)		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	Satuan	Target	Realisasi Indikator	Capaian (%)	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5 = (4/3)*100	6	7	8	9	10	11	12 = (11/10)*100	PILIH OPD
1.03.0.00.0.0.02.0.000.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	85.075.226.036,00	115.534.283.827,00	135,80	135,80							DINAS TATA RUANG DAN BANGUNAN
1.03.0.00.0.0.02.0.000.4.1.02	Retribusi Daerah	85.000.000.000,00	115.454.698.814,00	135,83	135,83	Outcome/Hasil						
						-						DINAS TATA RUANG DAN BANGUNAN
1.03.0.00.0.0.02.0.000.4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	85.000.000.000,00	115.454.698.814,00	135,83	135,83							

1.03.0.00.0.0.02.0.000.4.1.02.03.07	**Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung**	**85.000.000.000,00**	**115.454.698.814,00**	**135,83**	**135,83**							
1.03.0.00.0.0.02.0.000.4.1.02.03.07.0001	**Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung**	**85.000.000.000,00**	**115.454.698.814,00**	**135,83**	**135,83**							
1.03.0.00.0.0.02.0.000.4.1.04	**Lain-lain PAD yang Sah**	**75.226.036,00**	**79.585.013,00**	**105,79**	**105,79**							
1.03.0.00.0.0.02.0.000.4.1.04.13	**Pendapatan Denda Retribusi Daerah**	**75.226.036,00**	**79.585.013,00**	**105,79**	**105,79**							
1.03.0.00.0.0.02.0.000.4.1.04.13.03	**Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu**	**75.226.036,00**	**79.585.013,00**	**105,79**	**105,79**							

1.03.0.00.0.0 0.02.0 000.4. 1.04.1 3.03.0 016	**Pendapatan Denda Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Persetujuan Bangunan Gedung**	**75.226.036,0 0**	**79.585.013, 00**	**105,79**	**105,79**							
	JUMLAH PENDAPATA N DAERAH	**85.075.226.0 36,00**	**115.534.28 3.827,00**	**135,80**	**135,80**							
01.03. 01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kot a**	**36.005.826.5 27,00**	**34.438.031. 247,00**	**95,65**	**95,70**	**Outco me/Has il**	**-**	**-**	**-**			
						-	**Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggara n, dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**Pers en**	**100**	**100**	**100**	**DINAS TATA RUANG DAN BANGUNA N**
					rata2 fisik kegiata n	**-**	**Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa**	**Pers en**	**100**	**100**	**100**	**DINAS TATA RUANG DAN**

							penunjang dan pemeliharaan					**BANGUNAN**
1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	364.415.216,00	363.349.910,00	99,71	14,24	Output/ Keluaran	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Dokumen**	**9**	**9**	**100**	
1.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	80.357.716,00	80.357.410,00	100,00	22,05	-	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	3	100	DINAS TATA RUANG DAN BANGUNAN
1.03.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	49.202.000,00	49.202.000,00	100,00	13,50	-	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusubab Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1	100	DINAS TATA RUANG DAN BANGUNAN
1.03.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen	20.939.500,00	20.939.500,00	100,00	5,75	-	Jumlah Dokumen Perubahan	Dokumen	1	1	100	DINAS TATA RUANG

	Perubahan RKASKPD						RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusubab Dokumen RKA-SKPD					DAN BANGUNAN
1.03.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	23.731.000,00	23.731.000,00	100,00	6,51	-	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusubab Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	1	100	DINAS TATA RUANG DAN BANGUNAN
1.03.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	23.536.000,00	23.536.000,00	100,00	6,46	-	Jumlah Dokumen DPA Perubahan dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusubab Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1	100	DINAS TATA RUANG DAN BANGUNAN

1.03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	27.623.000,00	27.623.000,00	100,00	7,58	-	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisiar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	1	1	100	DINAS TATA RUANG DAN BANGUNAN
1.03.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	139.026.000,00	137.961.000,00	99,23	37,86	-	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	1	100	DINAS TATA RUANG DAN BANGUNAN
1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	23.058.944.796,00	22.800.056.674,00	98,88	19,78	Output/Keluaran	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan	**Dokumen**	**1**	**1**	**100**	
1.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	22.907.932.496,00	22.649.045.324,00	98,87	98,22	-	Jumlah Orang yang Menerima	Orang/Bulan	95	95	100	DINAS TATA RUANG DAN

							Gaji dan Tunjangan				BANGUNAN
1.03.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	13.140.000,00	13.140.000,00	100,00	0,06	-	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	1	100	DINAS TATA RUANG DAN BANGUNAN
1.03.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	39.513.500,00	39.512.550,00	100,00	0,17	-	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	1	1	100	DINAS TATA RUANG DAN BANGUNAN
1.03.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	39.324.000,00	39.324.000,00	100,00	0,17	-	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1	100	DINAS TATA RUANG DAN BANGUNAN

1.03.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	59.034.800,00	59.034.800,00	100,00	0,26	-	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan /Semesteran SKPD	Laporan	1	1	100	DINAS TATA RUANG DAN BANGUNAN
1.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	24.765.720,00	24.765.720,00	100,00	100,00	Output/ Keluaran	Jumlah Dokumen laporan Barang Milik Daerah	**Dokumen**	**1**	**1**	**100**	
1.03.01.2.03.06	Penatusahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	24.765.720,00	24.765.720,00	100,00	100,00	-	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Laporan	1	1	100	DINAS TATA RUANG DAN BANGUNAN
1.03.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan	45.044.000,00	45.014.000,00	99,93	99,93	Output/ Keluaran	Jumlah Laporan Pendapatan Daerah Kewenangan	**Dokumen**	1	1	100	

	Perangkat Daerah						Perangkat Daerah					
1.03.01.2.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	45.044.000,00	45.014.000,00	99,93	99,93		Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen	1	1	100	DINAS TATA RUANG DAN BANGUNAN
1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	619.643.200,00	606.437.000,00	97,87	48,93	Output/ Keluaran	Jumlah Pegawai yang di Fasilitasi	**Orang**	**80**	**80**	**100**	
1.03.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	441.712.200,00	435.855.000,00	98,67	70,34	-	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	150	150	100	DINAS TATA RUANG DAN BANGUNAN
1.03.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	177.931.000,00	170.582.000,00	95,87	27,53	-	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikut Pendidikan dan Pelatihan	Orang	80	80	100	DINAS TATA RUANG DAN BANGUNAN
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.055.569.804,00	2.617.498.000,00	85,66	12,24	Output/ Keluaran	Jumlah Jenis Kegiatan Administrasi Umum	**Dokumen**	**57**	**57**	**100**	

							Perangkat Daerah					
1.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.044.607.400,00	954.350.000,00	91,36	31,23	-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	10	10	100	DINAS TATA RUANG DAN BANGUNAN
1.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	814.377.500,00	800.697.500,00	98,32	26,20	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	15	15	100	DINAS TATA RUANG DAN BANGUNAN
1.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	231.578.904,00	223.954.500,00	96,71	7,33	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5	5	100	DINAS TATA RUANG DAN BANGUNAN
1.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	54.886.000,00	52.698.000,00	96,01	1,72	-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Paket	2	2	100	DINAS TATA RUANG DAN BANGUNAN
1.03.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	390.660.000,00	384.538.000,00	98,43	12,58	-	Jumlah Laporan Fasilitasi	Laporan	12	12	100	DINAS TATA RUANG

							Kunjungan Tamu					DAN BANGUNAN
1.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	519.460.000,00	201.260.000,00	38,74	6,59	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	100	DINAS TATA RUANG DAN BANGUNAN
1.03.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0,00	0,00	0,00	0,00	-	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	0	0	DINAS TATA RUANG DAN BANGUNAN
1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.601.527.915,00	6.942.182.412,00	91,33	45,66	Output/ Keluaran	Jumlah Jenis Kegiatan Jasa Penunjang	**Dokumen**	**3**	**3**	**100**	
1.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	190.368.000,00	42.663.412,00	22,41	0,56	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	1	100	DINAS TATA RUANG DAN BANGUNAN

1.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	7.411.159.915,00	6.899.519.000,00	93,10	90,76	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	100	DINAS TATA RUANG DAN BANGUNAN
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.235.915.876,00	1.038.727.531,00	84,05	16,81	Output/ Keluaran	Jumlah Jenis Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	**Dokumen**	**62**	**52**	**84**	
1.03.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	246.979.000,00	233.731.500,00	94,64	18,91	-	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	20	20	100	DINAS TATA RUANG DAN BANGUNAN
1.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan	484.266.876,00	311.740.031,00	64,37	25,22	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	20	13	65	DINAS TATA RUANG DAN

	Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya					BANGUNAN
1.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	143.110.000,00	134.915.000,00	94,27	10,92		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	20	20	100	DINAS TATA RUANG DAN BANGUNAN
1.03.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	180.780.000,00	179.200.000,00	99,13	14,50	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	100	DINAS TATA RUANG DAN BANGUNAN
1.03.01.2.09.10	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	180.780.000,00	179.141.000,00	99,09	14,49	-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	100	DINAS TATA RUANG DAN BANGUNAN

01:03:08	**Program Penataan Bangunan Gedung**	**250.060.500.753,00**	**233.876.468.433,00**	**93,53**	**13,36**	**Output /Keluaran** -	**Persentase Bangunan Gedung yang Berkualitas sesuai Perencanaan**	**Persen**	**31**	**31**	**100,00**	**DINAS TATA RUANG DAN BANGUNAN**
1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung Di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	250.060.500.753,00	233.876.468.433,00	93,53	13,36	Output/ Keluaran	Jumlah Bangunan Gedung di Wilayah Kabupaten Tangerang	**Dokumen**	**820**	**820**	**100,00**	
1.03.08.2.01.14	Pendaftaran Huruf Daftar Nomor (HDNo) Bangunan Gedung Negara	30.400.000,00	0,00	0,00	0,00	-	Jumlah Bangunan Gedung Negara yang Terdaftar Huruf Daftar Nomor (HDNo)	Dokumen	200	0	0	DINAS TATA RUANG DAN BANGUNAN

1.03.08.2.01.18	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	60.344.190.400,00	57.108.595.590,00	94,64	22,84	-	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat dan Diperiksa Berkala	Bangunan	34	34	100	DINAS TATA RUANG DAN BANGUNAN
1.03.08.2.01.19	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	8.499.200,00	0,00	0,00	0,00	-	Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan bangunan Gedung	Dokumen	1	0	0	DINAS TATA RUANG DAN BANGUNAN
1.03.08.2.01.04	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	89.020.200,00	34.200.000,00	38,42	0,01	-	Jumlah Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan	Dokumen	1	1	100	DINAS TATA RUANG DAN BANGUNAN

1.03.08.2.01.21	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	188.029.248.953,00	175.201.292.243,00	93,18	70,06	-	Jumlah Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	100	DINAS TATA RUANG DAN BANGUNAN
1.03.08.2.01.22	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	81.000.000,00	66.000.000,00	81,48	0,03	-	Jumlah Peserta yang Mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan dan Penyelenggaraannya	Orang	1	1	100	DINAS TATA RUANG DAN BANGUNAN

1.03.08.2.01.23	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	1.478.142.000,00	1.466.380.600,00	99,20	0,59	-	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Dokumen	10.420	10420	100	DINAS TATA RUANG DAN BANGUNAN

1.03.09	**Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya**	**21.434.134.220,00**	**19.833.930.800,00**	**92,53**	**23,13**	**Output /Keluaran**	-	-	-			
						-	**Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan sesuai dengan Rencana Bangunan dan Lingkungan**	**Persen**	**38**	**38**	**100**	**DINAS TATA RUANG DAN BANGUNAN**
1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daeah Kabupaten/Kota	21.434.134.220,00	19.833.930.800,00	92,53	23,13	Output/ Keluaran	Jumah Dokumen Penyelenggaraan Penataan bangunan dan Lingkungannya	**Dokumen**	**117**	**117**	**100,00**	
1.03.09.2.01.07	Pengawasan Penataan bangunan dan Lingkungan	450.000.000,00	380.250.000,00	84,50	1,77	-	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem	Kawasan	4	3	75	DINAS TATA RUANG DAN BANGUNAN

							Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya					
1.03.09.2.01.08	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	20.434.823.800,00	19.184.612.300,00	93,88	89,50	-	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Kawasan	4	4	100	DINAS TATA RUANG DAN BANGUNAN
1.03.09.2.01.09	Supervisi Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan	312.268.720,00	269.068.500,00	86,17	1,26	-	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem	Dokumen	4	3	75	DINAS TATA RUANG DAN BANGUNAN

	Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya						Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan					
1.03.09.2.01.10	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	237.041.700,00	0,00	0,00	0,00	-	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	0	0	DINAS TATA RUANG DAN BANGUNAN
01:03:12	**Program Penyelenggaraan Penataan Ruang**	**6.434.328.401,00**	**5.226.505.270,00**	**81,23**	**110,43**	**Outcome/Hasil**	**-**	**-**	**-**			
						-	**Persentase Penataan Ruang yang sesuai dengan**	**Persen**	**31**	**31**	**100**	**DINAS TATA RUANG DAN BANGUNAN**

							Rencana Tata Ruang					
1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	5.070.650.090,00	4.015.193.370,00	79,18	19,80	Outcome/Hasil	Jumlah Dokumen RTR	**Dokumen**	**7**	**7**	**100,00**	
1.03.12.2.01.03	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	211.863.800,00	197.943.000,00	93,43	3,90	-	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	Dokumen	2	820	41000	DINAS TATA RUANG DAN BANGUNAN
1.03.12.2.01.06	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	3.528.304.790,00	2.637.296.370,00	74,75	52,01	-	Jumlah Dokumen Administrasi Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	Dokumen	3	3	100	DINAS TATA RUANG DAN BANGUNAN
1.03.12.2.01.09	Pelaksanaan Evaluasi dan Konsultasi Evaluasi RTRW Kabupaten/Kota	1.056.010.800,00	935.448.000,00	88,58	18,45	-	Dokumen Persyaratan untuk Mendapatkan Keputusan	Dokumen	1	1	100	DINAS TATA RUANG DAN

							Gubernur Hasil Evaluasi					BANGUNAN
1.03.12.2.01.13	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan dan Pedoman Bidang Penataan Ruang	274.470.700,00	244.506.000,00	89,08	4,82	-	Jumlah Pemangku Kepentingan yang Mengikuti Kegiatan Sosialisasi	Orang	1	1	100	DINAS TATA RUANG DAN BANGUNAN
1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	89.976.800,00	25.200.000,00	28,01	28,01	Outcome/Hasil	Jumlah DokumenKoordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR kabupaten/Kota	**Dokumen**	**2**	**1**	**50**	
1.03.12.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	89.976.800,00	25.200.000,00	28,01	28,01	-	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Dokumen	2	1	50	DINAS TATA RUANG DAN BANGUNAN
1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan	536.177.661,00	531.356.900,00	99,10	33,03	Output/Keluaran	Jumlah Dokumen Sinkronisasi	**Dokumen**	**1**	**1**	**100**	

	Ruang Daerah Kabupaten/Kota						Pemanfaatan Ruang					
1.03.12.2.03.03	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	92.343.500,00	92.343.500,00	100,00	17,22	-	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Dokumen	1	1	100	DINAS TATA RUANG DAN BANGUNAN
1.03.12.2.03.04	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	44.806.200,00	44.806.200,00	100,00	8,36	-	Jumlah Layanan Persetujuan KKPR Sesuai dengan Ketentuan Waktu yang Berlaku	Layanan	144	144	100	DINAS TATA RUANG DAN BANGUNAN
1.03.12.2.03.07	Sistem informasi dan Komunikasi Penataan Ruang	399.027.961,00	394.207.200,00	98,79	73,52	-	Jumlah Sistem Informasi dan Komunikasi Penataan Ruang	Dokumen	1	1	100	DINAS TATA RUANG DAN BANGUNAN
1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	737.523.850,00	654.755.000,00	88,78	29,59	Output/ Keluaran	Jumlah Dokumen Pengendalian Ruang Daerah	**Dokumen**	**4**	**4**	**100**	

1.03.12.2.04.04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	189.471.100,00	151.730.000,00	80,08	20,57	-	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Dokumen	1	1	100	DINAS TATA RUANG DAN BANGUNAN
1.03.12.2.04.14	Pengawasan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang	224.597.500,00	205.933.500,00	91,69	27,92	-	Dokumen hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang	Dokumen	3	3	100	DINAS TATA RUANG DAN BANGUNAN
1.03.12.2.04.15	Pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal	323.455.250,00	297.091.500,00	91,85	40,28	-	Jumlah Berita Acara Pemberian Instentif dan/atau Disinsentif Non Fiskal	Berita Acara	1	1	100	DINAS TATA RUANG DAN BANGUNAN
	JUMLAH BELANJA	**313.934.789.901,00**	**293.374.935.750,00**	**93,45**	**93,50**							**DINAS TATA RUANG DAN BANGUNAN**

Rencana Kerja Dinas Tata Ruang dan Bangunan 2025

Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kabupaten Tangerang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang tata ruang dan bangunan sesuai dengan kewenangan dan kebijakan Pemerintah Daerah.

Untuk melaksanakan Rencana Kinerja Tahun 2024 diambil dari Pengukuran terhadap capaian/realisasi indikator sasaran. Sasaran Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kabupaten Tangerang adalah meningkatnya kualitas dan kuantitas perencanaan tata ruang, pemanfaatan tata ruang, intensitas dan efektifitas pengendalian pemanfaatan ruang dan pembangunan, bangunan gedung pemerintah dan kapasitas kelembagaan OPD.

Dinas Tata Ruang dan Bangunan pada Tahun Anggaran 2025 mendapatkan perhitungan Pendapatan Rp. **85.000.000.000**,- serta Perubahan Anggaran Rp. **100.000.000.000**,- dan Belanja meliputi 4 program dan 13 kegiatan yang terbagi dalam beberapa sub kegiatan. Total belanja Rp. **379.889.690.830**,- Belanja Gaji sebesar Rp. **24.495.222.119**,-

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam menganalisis kinerja pelayanan yang diselenggarakan oleh suatu organisasi, maka dari itu organisasi memerlukan suatu ukuran yang dijadikan tolak ukur guna mengukur tingkat capaian kinerja. Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kabupaten Tangerang sebagai penyelenggara pelayanan dalam bidang penataan ruang dan bangunan gedung daerah telah memiliki tolak ukur yang jelas digunakan dalam mengukur tingkat capaian kinerja Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kabupaten Tangerang , Ukuran yang digunakan adalah indikator program yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kabupaten Tangerang. Dinas Tata Ruang dan Bangunan telah menentukan arah kebijakan yang dituangkan dalam Penetapan Kinerja dan dilaksanakan oleh Sekertariat dan Bidang-bidang dengan dukungan dana yang tersedia dalam program dan kegiatan.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Tugas Pokok Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kabupaten Tangerang yaitu melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Tata Ruang dan Bangunan sesuai dengan kewenangan dan kebijakan Pemerintah Daerah yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Tangerang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata kerja Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kabupaten Tangerang. Dinas Tata Ruang dan Bangunan memiliki fungsi sebagai berikut :

a. Perumusan kebijakan Tata Ruang dan Bangunan;
b. Pelaksanaan kebijakan Tata Ruang dan Bangunan;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan Tata Ruang dan Bangunan;
d. Pelaksanaan administrasi Dinas Tata Ruang dan Bangunan; dan

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Dinas Tata Ruang dan Bangunan terdiri dari :

a. Kepala Dinas;

b. sekretariat, terdiri atas;

I. subbagian umum dan kepegawaian;

2. subbagian perencanaan dan keuangan; dan

3. Kelompok Jabatan Fungsional;

c. bidang penataan ruang, terdiri atas

Kelompok Jabatan Fungsional;

d. bidang penataan bangunan gedung, terdiri atas

Kelompok Jabatan Fungsional;

e. bidang penataan Kawasan dan jasa Konstruksi, terdiri atas

Kelompok Jabatan Fungsional; dan

f. UPTD

TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS DAN TATA KERJA DINAS TATA RUANG BANGUNAN DAN BANGUNAN KABUPATEN TANGERANG

1 Kepala Dinas

(1) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina serta mengendalikan urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan bangunan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah.

(2) Dalam melaksanakan tugas Dinas menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis yang terkait dengan penyelenggaraan penataan ruang, penataan bangunan gedung, penataan kawasan, dan jasa konstruksi;
b. pelaksanaan kebijakan teknis yang terkait dengan penyelenggaraan penataan ruang, penataan bangunan gedung, penataan kawasan, dan jasa konstruksi;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan yang terkait dengan penyelenggaraan penataan ruang, penataan bangunan gedung, penataan kawasan, dan jasa konstruksi;
d. pelaksanaan administrasi yang terkait dengan penyelenggaraan penataan ruang, penataan bangunan gedung, penataan kawasan, dan jasa konstruksi; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

(3) Dalam melaksanakan fungsi Kepala Dinas mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

a. merumuskan program kerja DTRB, meliputi program kerja penyelenggaraan penataan ruang, penataan bangunan gedung, penataan kawasan, danjasa konstruksi;

b. mengoordinasikan pelaksanaan program kerja DTRB, meliputi program kerja penyelenggaraan penataan ruang, penataan bangunan gedung, penataan kawasan, dan jasa konstruksi;

c. membina kinerja aparatur di lingkungan DTRB;

d. mengarahkan pelaksanaan program kerja DTRB, meliputi program kerja penyelenggaraan penataan ruang, penataan bangunan gedung, penataan kawasan, dan jasa konstruksi;

e. menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dan pelayanan umum di bidang penyelenggaraan penataan ruang, bidang penataan bangunan gedung, bidang penataan kawasan, dan jasa konstruksi;

f. menyelenggarakan program kerja DTRB, meliputi program kerja penyelenggaraan penataan ruang, penataan bangunan gedung, penataan kawasan, dan jasa konstruksi;

g. mengevaluasi hasil pelaksanaan program kerja DTRB, meliputi program kerja penyelenggaraan penataan ruang, penataan bangunan gedung, penataan kawasan, dan jasa konstruksi;

h. melaporkan pelaksanaan program kerja DTRB kepada Bupati, meliputi program kerja penyelenggaraan penataan ruang, penataan bangunan gedung, penataan kawasan, dan jasa konstruksi; dan

i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

2 Sekretariat

(1) Sekretariat berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Dinas.

(3) Dalam melaksanakan tugas Sekretariat Dinas mempunyai tugas :

a. penyiapan rumusan kebijakan teknis yang berkaitan dengan umum, kepegawaian, perencanaan, dan keuangan;
b. penyiapan rencana dan program kerja yang berkaitan dengan umum, kepegawaian, perencanaan, dan keuangan;
c. penyiapan pengendalian yang berkaitan dengan umum, kepegawaian, perencanaan, dan keuangan;
d. penyiapan bimbingan yang berkaitan dengan umum, kepegawaian, perencanaan, dan keuangan;
e. pengelolaan administrasi yang berkaitan dengan umum, kepegawaian, perencanaan, dan keuangan;
f. penyiapan fasilitasi pengelola informasi dan dokumen;
g. penyiapan dan pelaksanaan pengembangan *e-goverment*;
h. penyiapan bahan pemenuhan program aplikasi sistem akuntabilitas kinerja intansi pemerintah secara elektronik;
i. pelaksanaan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah; dan
j. pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

(4) Dalam melaksanakan fungsi Sekretaris Dinas mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
a. merencanakan perumusan kebijakan yang terkait dengan umum, kepegawaian, perencananaan dan keuangan;
b. membagi tugas program yang terkait dengan umum, kepegawaian, perencananaan dan keuangan;
c. memberi petunjuk program yang terkait dengan umum, kepegawaian, perencananaan dan keuangan;
d. mengatur program kegiatan yang terkait dengan umum, kepegawaian, perencananaan dan keuangan;
e. mengendalikan mutu bahan rencana pembangunan jangka menengah Daerah dan rencana strategis dalam bidang kepegawaian Daerah sebagai bahan penyusun rencana pembangunan rencana pembangunan jangka menengah Daerah dan rencana strategis Daerah;
f. mengendalikan mutu rencana kerja dan anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran DTRB;
g. mengendalikan mutu dan mengolah bahan evaluasi program dan kegiatan DTRB;
h. mereviu dan mengendalikan mutu laporan kinerja instansi pemerintah;
i. mengatur pemenuhan program aplikasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah secara elektronik;
j. merumuskan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah;
k. mengatur administrasi barang milik Daerah DTRB;
l. mengatur administrasi kepegawaian Perangkat DTRB;
m. mengatur administrasi umum DTRB; dan
n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

(5) Sekertaris Dinas dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;

(6) Sekertaris Dinas membawahkan :
a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

❖ Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

(1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh kepala subbagian;

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai rincian tugas:

a. menyusun dokumen perencanaan Perangkat Daerah;
b. melaksanakan koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD
c. melaksanakan koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD;
d. melaksanakan koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD;
e. melaksanakan koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD;
f. melaksanakan koordinasi dan pen1rusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD;
g. melaksanakan evaluasi kinerja Perangkat Daerah;
h. merencanakan kegiatan keuangan;
i. membimbing pelaksanaan kegiatan administrasi keuangan;
j. melaksanakan kegiatan administrasi keuangan;
k. menghimpun, mengolah, dan membayar gaji serta tunjangan ASN;
l. melaksanakan pengujian/verifikasi keuangan;
m. membuat laporan akuntansi;
n. menyusun dan mengolah laporan akhir tahun terkait keuangan;
o. menyiapkan bahan tanggapan pemeriksaan;
p. menyusun laporan dan analisis prognosis realisasi anggaran;
q. melaksanakan pencatatan, pembukuan, dan pengajuan keuangan;
r. membagi tugas pelaksanaan kegiatan administrasi keuangan;

s. membuat laporan pelaksanaan kegiatan administrasi keuangan yang meliputi:
    4. laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Perangkat Daerah;
    5. laporan prognosis realisasi anggaran, neraca, laporan realisasi anggaran;
    6. laporan operasional;
    7. laporan perubahan ekuitas; dan
    8. catatan atas laporan keuangan;
t. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang terkait keuangan; dan
u. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.

❖ Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh kepala subbagian.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai rincian tugas:
a. merencanakan kegiatan umum dan kepegawaian, organisasi, dan tata laksana DTRB;
b. membimbing pelaksanaan kegiatan umum dan kepegawaian;
c. membagi tugas pelaksanaan kegiatan umum dan Kepegawaian;
d. melaksanakan perencanaan kebutuhan, pengamanan, koordinasi dan penilaian, pembinaan, pengawasan pengendalian, rekonsiliasi dan penyusunan laporan, penatausahaan dan pemanfaatan barang milik Daerah;
e. melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian;
f. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai;
g. memfasilitasi pemulangan pegawai yang pensiun serta yang meninggal dalam melaksanakan tugas;
h. memfasilitasi pemindahan tugas ASN;
i. melaksanakan fasilitasi pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi;
j. melaksanakan penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor, peralatan rumah tangga, bahan logistik kantor, barang cetakan dan penggandaan, bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, serta bahan/material;
k. melaksanakan penatausahaan arsip dinamis;

l. melaksanakandukunganpelaksanaan sistempemerintahan berbasis elektronik;

m. melaksanakan penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi dan zona integritas;

n. melaksanakan administrasi/penatausahaan, penggandaan, pengiriman, pendistribusian surat, tata naskah dinas, arsip dinamis DTRB, jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, penyedian jasa peralatan dan perlengkapan kantor, serta jasa pelayanan umum kantor;

o. melaksanakan pengadaan penyusunan rencana kebutuhan barang milik Daerah, administrasi/penatausahaan barang milik Daerah, serta penyusunan laporan barang milik Daerah;

p. memfasilitasi peralatan dan perlengkapan kantor, rumah tangga, sarana dan prasarana kantor, perjalanan dinas, serta kendaraan operasional/dinas;

q. memfasilitasi pengadaan mebel, peralatan dan mesin, pengadaan aset tetap lainnya, pengadaan aset tetap tak berwujud, pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya, serta pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya;

r. memfasilitasi penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi DTRB serta kunjungan tamu;

s. memfasilitasi pengelolaan informasi dan dokumen;

t. melaksanakan penyrrsunan bahan untuk peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai;

u. menyusun kebutuhan pakaian dinas berserta atribut kelengkapannya;

v. mempersiapkan koordinasi pelaksanaan analisa jabatan, analisa beban kerja, serta kebutuhan pegawai;

w. menghimpun dan mengolah data administrasi kepegawaian;

x. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan serta mengadakan bimbingan teknis implementasinya;

y. membuat laporan pelaksanaan kepegawaian; dan

z. melaksanakan tugas kedinasan oleh pimpinan.

3. Bidang Penataan Ruang

Bidang Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 mempunyai tugas merumuskan kebijakan, mengoordinasikan,

pembinaan, pengawasan, dan pengendalian penyelengaraan penataan ruang.

(1) Dalam melaksanakan tugas pokok Bidang penataan ruang mempunyai fungsi sebagai berikut:
   a. penyiapan rumusan kebijakan teknis yang terkait dengan penyelenggaraan penataan ruang;
   b. penyusunan program dan kegiatan penyelengaraan penataan ruang;
   c. pelaksanaan kegiatan penyelengaraan penataan ruang;
   d. pengendalian kegiatan penyelengaraan penataan ruang;
   e. pengelolaan administrasi yang terkait dengan penyelenggaraan penataan ruang;
   f. penyiapan bahan penetapan rencana tata ruang wilayah dan rencana rinci tata ruang Daerah;
   g. pengoordinasian dan sinkronisasi perencanaan tata ruang;
   h. pengoordinasian dan sinkronisasi pemanfaatan ruang Daerah;
   i. pelaksanaan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi, meliputi pelaksanaan insentif dan disinsentif bidang penataan ruang, penertiban dan penegakan hukum, pelanggaran pemanfaatan ruang, operasionalisasi penyidik pegawai negeri sipil bidang penataan ruang;
   j. penyiapan bimbingan dan penggelolaan administrasi teknis yang terkait dengan perencanaan tata ruang, pemanfaatan serta pemetaan;
   k. pengoordinasian dan sinkronisasi pelayanan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, dan pelayanan lain sebagai tindak lanjut dari rencana tata ruang;
   l. penyiapan bahan pemonitoran, dan evaluasi penyelenggaraan penataan ruang; dan
   m. pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

(2) Dalam melaksanakan fungsi Kepala Bidang Penataan Ruang mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
   a. menyusun rencana dan kebijakan program penyelenggaraan penataan ruang;
   b. membagi tugas program penyelenggaraan penataan ruang;
   c. memberikan petunjuk dan bimbingan
   d. pelaksanaan program penyelenggaraan penataan
   e. ruang;
   f. melaksanakan monitoring dan evaluasi program penyelenggaraan penataan ruang; dan
   g. melaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan;

4. Bidang Penataan Bangunan Gedung

(1) Bidang penataan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, dan

pengendalian bidang penataan bangunan gedung, meliputi bangunan gedung skala kabupaten, bangunan gedung bersama, bangunan gedung negara, bangunan gedung swasta, dan bangunan gedung masyarakat.

(2) Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang Penataan Bangunan Gedung mempunyai fungsi:
a. penyiapan rumusan kebijakan teknis yang terkait dengan penataan bangunan gedung;
b. penyusunan program dan kegiatan penataan bangunan gedung;
c. pelaksanaan kegiatan penataan bangunan gedung;
d. pengendalian kegiatan penataan bangunan gedung;
e. pengelolaan administrasi yang terkait dengan penataan bangunan gedung;
f. penyelenggaraan bangunan gedung di Daerah, pemberian persetujuan bangunan gedung, dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung, meliputi pendaftaran huruf daftar nomor bangunan gedung negara, identifikasi pen eta pan penyelenggaraan bangunan gedung cagar budaya yang di lestarikan untuk kepentingan strategis daerah, pemberian kompensasi, insentif dan disinsentif kepada pemilik, pengguna, dan/ atau pengelola bangunan gedung cagar budaya untuk kepentingan strategis daerah, pengubahsuaian bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah, pemeliharaan, perawatan, dan pemeriksaan berkala bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah, penyusunan kebijakan terkait penyelenggaraan bangunan gedung, bantuan teknis pembangunan bangunan gedung negara untuk kepentingan strategis, pembangunan, pemanfaatan, pelestarian dan pembongkaran bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan bangunan gedung, penyelenggaraan penerbitan persetujuan bangunan gedung, sertifikat laik fungsi, surat bukti kepemilikan bangunan gedung, rencana teknis pembongkaran bangunan gedung, tim profesi ahli, tim penilai teknis, penilik, dan pendataan bangunan gedung melalui sistem informasi manajemen bangunan gedung;
g. pelaksanaan pelayanan lain sebagai tindak lanjut
h. dari rencana tata ruang; dan
i. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan.;

(3) Dalam melaksanakan fungsi Kepala Bidang Penataan Bangunan Gedung mempunyai rincian tugas:
a. menyusun rencana dan kebijakan program penataan bangunan gedung;
b. membagi tugas program program penataan bangunan gedung;

c. memberikan petunjuk dan bimbingan pelaksanaan program penataan bangunan gedung;
d. melaksanakan monitoring dan evaluasi program penataan bangunan gedung; dan
e. melaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan
f. oleh pimpinan.

5. Bidang Penataan Kawasan dan Jasa Konstruksi

(1) Bidang Penataan Kawasan dan Jasa Konstruksi dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2) Bidang Penataan Kawasan dan Jasa Konstruksi dipimpin oleh Kepala Bidang Penataan Kawasan dan Jasa Konstruksi.

(3) Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang Penataan Kawasan dan Jasa Konstruksi mempunyai fungsi:
a. penyiapan rumusan kebijakan teknis, yang terkait dengan penataan Kawasan dan Jasa Konstruksi;
b. penyusunan program dan kegiatan penataan Kawasan dan jasa konstruksi
c. pelaksanaan kegiatan penataan Kawasan dan jasa konstruksi
d. pengendalian kegiatan penataan Kawasan dan jasa konstruksi
e. pengelolaan administrasi yang terkait dengan penataan Kawasan dan jasa konstruksi
f. penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya, meliputi pengawasan penataan bangunan dan lingkungan, penataan bangunan dan lingkungan Kawasan cagar budaya, Kawasan pariwisata, Kawasan sistem perkotaan nasional dan Kawasan strategis lainnya, supervise penataan bangunan dan lingkungan Kawasan cagar budaya, Kawasan pariwisata, Kawasan sistem perkotaan nasional dan Kawasan strategis lainnya, penyusunan rencana dan teknis penataan bangunan dan lingkungan di Kawasan strategis daerah;
g. penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi, meliputi penyediaan *training need assessment* pelatihan tenaga kerja konstruksi kualifikasi jabatan operator dan teknisi atau analis, fasilitasi sertifikasi tenaga kerja konstruksi kualifikasi jabatan operator dan teknisi atau analis, pembinaan dan peningkatan kapasitas kelembagaan jasa konstruksi penyediaan insstruktur /asesor/ penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja konstruksi kualifikasi jabatan operator dan teknisi atau analis, identifikasi potensi kerja sama dan pemberdayaan jasa konstrusi, pemantauan dan evaluasi pelatihan tenaga kerja konstruksi kualifikasi jabatan operator dan teknisi atau analis, serta penyediaan standar operasional prosedur penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja konstruksi kualifikasi jabatan operator, teknisi atau analis, pelatihan tenaga kerja konstruksi kualifikasi jabatan operator, teknisi atau analis;
h. penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah, meliputi penyediaan perangkat pendukung layanan informasi jasa konstruksi, penyediaan data dan informasi jasa konstruksi cakupan daerah, peningkatan kapasitas pengelola

sistem informasi pembina jasa konstruksi, operasionalisasi layanan informasi jasa konstruksi.

i. Penerbitan izin usaha jasa konstruksi nasional (non kecil dan kecil), meliputi pemantauan dan evaluasi perizinan berusaha berbasis risiko jasa konstruksi, dan penyusunan produk hukum daerah terkait penyelenggaraan jasa konstruksi;
j. pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan produk jasa konstruksi meliputi pengawasan dan evaluasi tertib penyelenggaraan jasa konstruksi, pengawasan dan evaluasi tertib pemanfaatan produk jasa konstruksi, penyusunan standar operasional prosedur/pedoman tertib ushaa, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan produk jasa konstruksi;
k. pelaksanaan pelayanan persetujuan bangunan gedung, sertifikat laik fungsi, sertifikasi tenaga kerja konstruksi, dan pelayanan lain sebagai tindak lanjut dari rencana tata ruang; dan
l. pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

(4) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana Kepala Bidang Penataan Kawasan dan Jasa Konstruksi mempunyai rincian tugas:
a. Menyusun rencana dan keijakan program penataan kawasan dan jasa konstruksi;
b. Membagi tugas program penataan kawasan dan jasa konstruksi;
c. Memberikan petunjuk dan bimbingan pelaksanaan program penataan kawasan dan jasa konstruksi;
d. Melakukan monitoring dan evaluasi program penataan kawasan dan jasa konstruksi; dan
e. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

6. UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional.

3 Rancangan Pagu di Anggaran Dinas Tata Ruang dan Bangunan Tahun 2025

Dinas Tata Ruang dan Bangunan pada Tahun Anggaran 2025 mendapatkan perhitungan Pendapatan Rp. **85.000.000.000**,- serta di Anggaran Perubahan Rp. **100.000.000.000**,- dan Belanja meliputi 4 program dan 13 kegiatan yang terbagi dalam beberapa sub kegiatan. Total belanja Rp. **379.889.690.830**,- Belanja Gaji sebesar Rp. **24.495.222.119**,-.

Dinas Tata Ruang dan Bangunan mendapatkan Anggaran untuk kegiatan Penunjukan Langsung (PL) yang berupa kegiatan pembangunan dari Pokok Pikiran (Pokir) sebanyak 121 kegiatan

NO	URAIAN
1	Pembangunan balai warga Perum Rajeg mas pratama RT 08 RW 06 Kel Sukatani Kec Rajeg
2	Balai warga RW 06 Perum bumi indah tahap 1 kel kutajaya kec ps kemis
3	Balai warga Perum Griya Artha Rajeg blok A RT 07 RW 08 Desa Rajeg Mulya Kec Rajeg
4	Balai warga Perum Tanjakan Mekar City RT 15 RW 08 Desa Tanjakan Mekar Kec Rajeg

5	Lanjutan Pembangunan GSG Wisma Emas RT 006/014 Kel. Kutajaya Kec. Pasar Kemis
6	Pembangunan struktur GSG Perum Duta Asri Palem 5 RT. 003/001 Ds. Sarakan Kec. Sepatan
7	Pembangunan Sarana Olah Raga Duta Asri Palem 7 Ds. Pondok Jaya Kec. Sepatan
8	GAPURA Desa Onyam Kec.Gunung Kaler
9	Pembangunan Balai Warga Rt. 01 Graha Lestari Kelurahan Mekarbakti Kecamatan Panongan
10	Pembangunan Balai Warga Rw.04 Desa Peusar Kecamatan Panongan
11	Pembangunan Sarana Prasarana Olahraga Cluster Mutiara Curug1 Rt.01/15 Kelurahan Sukabakti
12	Lanjutan Balai /Sekretariat warga RT 01 RW 14 Perum Citra Pasundan Curug Wetan
13	Sekretariat RW 12 Perum Curug Garden Curug Kulon
14	Gapura Perum Persada Elok 1 Puesar Panongan
15	Lanjutan Balai warga RW 20 Sukabakti Curug
16	lapangan Olahraga RW 26 Sukabakti
17	Pembangunan Gedung Sekretariat Karang taruna Kecamatan Cikupa
18	Balai warga perun kutabumi 7 astina rt 04/16 (Rt soleh) Kel. Sukatani Kec. Rajeg
19	Balai warga Perumahan mutiara Puri harmoni RT.19/14 Sukamanah. Desa. Sukamanah Kec. Rajeg
20	Pembangunan balai warga perum sutera mediterania Rt 11/3 Desa. mekarsari Kec. Rajeg
21	pembangunan taman bermain anak rt 06/01 perum sindang asri Desa. sindang panon Kec. Sindang Jaya
22	Pembangunan Gapura perum metro rt 06/05 Kel. sukatani Kec. Rajeg
23	Pembangunan Balai warga perum sukamanah Residence rt 04/14 (pak danang) Desa. Sukamanah Kec. Rajeg
24	Lanjutan Pembangunan GOR Puri Asih RT 005 RW 007 Kadu Jaya Desa. Kadu Jaya Kec. Curug
25	Gapura/Pemagaran Makam Tubagus Muhsin Kirabun Desa. Kosambi Dalam Kec. Mekar Baru
26	Balai warga Kp. Tegal Rt 03 Rw 01 Ds. Kresek Kec. Kresek
27	Balai Warga Kp Kijaid RT 002 RW 001 Desa Cipaeh Kec Gunung Kaler
28	Balai warga Makam Uyut Ijah RW 08 (RT Leang) Desa Sindangpanon Kecamatan Sindang jaya, Kab. Tangerang
29	Balai Warga Perum telaga bestari RT 03 RW 01 Desa Wanakerta Kecamatan Sindang Jaya, Kab. Tangerang
30	Renovasi Balai Warga Kp Medang RW 003 Kel.Medang Kec.Pagedangan
31	Renovasi Balai Warga Perum Catalina Rt.004/006 Kel.Medang Kec.Pagedangan
32	Pembangunan Balai Warga Perumahan Bermis Rw. 04 Kel. Cisauk Kec. Cisauk
33	Pembangunan Gapura RW. 13 Kelurahan Medang Kec. Pagedangan
34	Pembangunan Balai Warga Desa Sodong Kec. Tigaraksa
35	Pembangunan Balai Warga Perumahan Paradise Park 1 RT. 008 RW. 004 Kel. Sepatan Kec. Sepatan
36	Balai Warga Rw.11 Puri 3 Desa Pasir Nangka Kec.Tigaraksa
37	BaLai Warga Permata Balaraja Rt.11 Desa Saga Kec.Balaraja
38	BaLai Warga Permata Balaraja Rt.06 Desa Saga Kec.Balaraja
39	Balai Warga PWS Taman Rt.01 Rw.03 Desa Margasari Kec.Tigaraksa
40	Penataan Fasilitas Olahraga Kp.Seglog Rw.02 Desa Pasir Bolang
41	Pembangunan Sekretariat Rt. Perum Sudirman Rt.05 Desa Pasir Nangka
42	Pembangunan Sarana Olah Raga Neo Rajeg City RT. 05/02 Ds. Rajeg Mulya Kec. Rajeg

43	Pembangunan GSG Nuansa mekarsari I RT. 06/06 Ds. Mekarsari Kec. Rajeg
44	Pembangunan Sarana Olah Raga Rajawali City RT. 005/007 Ds. Rajeg Kec. Rajeg
45	Pembangunan Sarana Olah Raga Griya Asri Sukamanah II RT. 014/012 Ds. Sukamanah Kec. Rajeg
46	Pembangunan GSG Griya Artha I RT. 07/08 Ds. Rajeg Mulya Kec. Rajeg
47	gapura pondok permata RT. 10/10 Ds. Rajeg Mulya Kec. Rajeg
48	Pembangunan Sarana Olahraga gardenia RT. 009/011 Ds. Rajeg Mulya Kec. Rajeg
49	Pembangunan GSG RT. 11/12 Ds. Rajeg Mulya Kec. Rajeg
50	Pembangunan Sarana Olah Raga Perum Tomang Baru RT. 008/013 Ds. Gelam Jaya Kec. Pasar Kemis
51	Pembangunan Sarana Olah Raga RT. 009/017 kel. Kutabumi Kec. Pasar Kemis
52	Pembangunan Sarana Olah Raga Griya Asri Sukamanah II RT. 03/012 Ds. Sukamanah Kec. Rajeg
53	Pembangunan GSG TRM rt. 11/04 ds. rajeg mulya Kec. Rajeg
54	Pembangunan kantor sekretariat karang taruna kec. rajeg Kec. Rajeg
55	Penataan taman Rt. 05/ 08 kel. kutajaya Kec. Pasar Kemis
56	pembangunan GSG pondok rezeki rt. 09/06 kel. kutabaru Kec. pasar kemis
57	lanjutan pembangunan gedung sekretariat PSHT sindangpanon residen rt. 01/10 ds. sindangpanon Kec. Sindang jaya
58	Pembangunan sekretariat karang taruna Desa. Caringin Kec. Legok
59	Pembangunan gedung serba guna RAFLESIA Rw04 Desa. Ciakar Kec. Panongan
60	Pembangunan Balai Warga Rt 05/08 Ds. Parahu Kec. Sukamulya
61	Pembangunan Gapura Perum Taman Balaraja Rt 02/07 Ds. Parahu Kec. Sukamulya
62	Pembangunan Balai Warga Kp.Ciakar lingkungan RW 004 Desa. Cileles Kec. Tigaraksa
63	Pembangunan Sarpras Lingkungan Kantor Kecamatan Tigaraksa Kel. Tigaraksa Kec. Tigaraksa
64	Balai Warga RT 17 RW 05 Desa Cibadak Kec. Cikupa
65	Lapangan Olahraga RT 13 Desa Bojong Kec. Cikupa
66	Lapangan Olahraga RT 30 Desa Dukuh Kec. Cikupa
67	Balai Warga RT 27 RW 06 Desa Dukuh Kec. Cikupa
68	Lanjutan Pembangunan Sarana Olahraga Semi Outor Rt 21 / rw 05 Perum Bukit Tiara ,Desa pasir jaya Kec. Cikupa
69	Pembangunan Balai Warga Kp. Pekong Rt. 07/02 Ds. Saga Kec. Balaraja
70	Pembangunan Balai Warga Kp. Marga Luyu Rt 01/01 Ds. Sukatani Kec. Cisoka
71	Pembangunan Gapura Rw 07 Ds. Sukatani Kec. Cisoka
72	Pembangunan Lanjutan Lapang Volly Bumi Asri Sukamantri RW 014 Desa Sukamantri Kec. Pasar Kemis
73	Kanopi balai warga RW 09 Gelam Jaya Kec. Pasar Kemis
74	Lanjutan Gedung Serbaguna RW 05 Gelam Jaya Kec. Pasar Kemis
75	Lanjutan Gedung Serbaguna RW 21 Gelam Jaya Kec. Pasar Kemis
76	Lanjutan Pembangunan Pagar GSG Suka Asih Kec. Pasar Kemis
77	Lanjutan Gedung Serbaguna RW 04 Kutabaru Kec. Pasar Kemis
78	Lanjutan Gedung Serbaguna RW 11 Sukamantri Kec. Pasar Kemis
79	Lanjutan Pembangunan Rumah Literasi Pemanis RW 08 Gelam Jaya Kec. Pasar Kemis
80	Pembangunan balai warga RT 07 RW 11 Gelam Jaya Kec. Pasar Kemis
81	Renovasi Gapura RW 05 Kutajaya Kec. Pasar Kemis
82	Pembangunan Taman Bermain Perum Pws Rt 02 Rw 02 Desa. Margasari Kec. Tigaraksa
83	Pembangunan Balai Warga Perum Pws Rt 08 Rw 02 Desa. Margasari Kec. Tigaraksa

84	Rehab Balai Warga Perum Pews Rt05/02 Desa. Margasari Kec. Tigaraksa
85	Pembangunan Taman Bermain Perum Pws Rt 09 Rw 02 Desa. Margasari Kec. Tigaraksa
86	Balai Warga Perumahan Cluster Mutiara Korelet 2 Rt. 04/03 Ds. Ranca Kalapa Kec. Panongan
87	Pembangunan Balai Warga Rw 07 Kel. Bencongan Indah Kec. Kelapa Dua
88	Pembangunan balai warga Kp.Cibelut RT 02/01 Ds.Cibogo Kec.Cisauk
89	Pembangunan balai warga Kp.Cicayur komplek RT 06/06 Kel.Cisauk Kec.Cisauk
90	PEMBANGUNAN BALAI WARGA DAN POSYANDU RT.01 RW.014 KEL. KELAPA DUA KEC. KELAPA DUA
91	Pembuatan Kanopi Balai Warga "KPM Bintang 21 Bencongan" RW.21 Kel. Bencongan, Kec. Kelapa Dua
92	Penataan lapangan olah raga Badminton Kp. Sawah RW.003 Desa Lengkongkulon Kec. Pagedangan
93	Pembangunan Gapura Kp. Pagar haur RW.001 Desa Pagedangan Kec. Pagedangan
94	Pembangunan Gapura Cicayur 1 RW 02 Desa Pagedangan Kec. Pagedangan
95	Gapura Rt.13/01 Desa Talagasari Kec. Cikupa
96	Gapura TPU Rt.01/07 Desa Sukanegara Kec Cikupa
97	Balai Warga Mekar Asri 1 Rt03/07 Kel. Mekar Bakti Kec. Panongan
98	Gapura Kp. Nalagati Rw.04 Desa Mekar Bakti Kec. Panongan
99	Balai warga Taman Picaso Rw02 Desa Ciakar Kec. Panongan
100	Pengadaan Gapura Utama Kp.Peusar Rt.008/01 Kp.Peusar Rt.008/001 Kel. Binong Kec. Curug
101	Pengadaan Gapura Kp.Peusar Rt.005/01 Kp.Peusar Rt.005/01 Kel. Binong Kec. Curug
102	Pengadaan Gapura Perbatasan Binong Permai Menuju Bonang Binong Permai Rw.009 Kel. Binong Kec. Curug
103	Balai Warga Perumahan Grand Cisoka Residence Rt.005/005 Desa Karang Harja
104	Balai Warga Perumahan Villa Balaraja Rt.09 Rw.04 Desa Saga Kecamatan Balaraja
105	Lanjutan Gor Perumahan Grand Balaraja Residence Blok C Rt.01 Rw.05 Desa. Solear Kecamaatan Solear
106	Lanjutan Penataan Lapangan Olah Raga Rw. 14 Desa. Pasanggrahan Kec. Solear
107	Renovasi Total Pembg Pedepokan Yayasan BHSK Ds. Tegal Kunir Kidul Rt. 012/003 Kec. Mauk
108	Pembg Mesjid YAYASAN HAJI SANWANI JUARSA (YHSJ) Ds. Tegal Kunir Kidul Rt. 013/003 Kec. Mauk
109	Sarana & Prasarana Olahraga (Pengecoran Lapangan Voly) RT. 003 RW. 005 Perum. Griyayasa Ds. Pasir Gadung Kec. Cikupa
110	Renovasi Balai Warga RT.01 RW.06 Desa Ciakar Kec. Panongan
111	Lanjutan Pembangunan GSG Graha Rafelesia Blok D29 RT.003/10 Desa Ciakar Kec. Panongan
112	Pembangunan GSG RW.03 Perum Nirwana Curug Desa Ciakar Kec. Panongan
113	Pembangunan Balai Warga RW.001, Kp. Gelam Pabuaran, Kelurahan Kutajaya, Kecamatan Pasar Kemis
114	Pembangunan Balai Warga, Perumahan Graha Anindya Rt.004/003, Desa Rajeg, Kecamatan Rajeg
115	Pembangunan sarana olahraga Lapangan Futsal Desa Tegal kunir lor Kec Mauk
116	pembangunan Gapura masjid AT - TAQWA Desa Tegal kunir lor kec Mauk
117	Pembangunan sarana olahraga lapangan bulu tangkis Desa ciakar kec Panongan
118	Pembangunan Gsg Desa Kadu Jaya Desa. Kadu Jaya Kec. Curug
119	Pembangunan Gedung Olah Raga Perum Royal Cikupa Permai. Rt 29 Rw 06 Ds.Dukuh Kec.Cikupa Kab.Tangerang Prov Banten , Sarana Olahraga /Gor
120	Renovasi Lapangan Olahraga Perum Medang Lestari Rw 010 Kel. Medang Kec. Pagedangan

121	Renovasi Lapangan Olahraga Perum Medang Lestari Rw 08 Kel. Medang Kec. Pagedangan

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Tata Ruang dan Bangunan

Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran atau implementasi tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Tangerang dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional untuk kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun ke depan. Oleh karena itu berdasarkan Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Tangerang yaitu Meningkatkan Pemerataan Dan Kualitas Infrastruktur untuk Dinas Tata Ruang telah dijabarkan tujuan dan Sasaran.

Tujuan :

- Meningkatnya Kepatuhan Tata Ruang;
- Meningkatnya Kinerja Dinas Tata Ruang dan Bangunan

Sasaran :

- Meningkatkan Kualitas Pemanfaatan Ruang
- Meningkatkan Kualitas Penataan Bangunan dan Lingkungan
- Meningkatkan Rasio Kepatuhan PBG Kab/Kota
- Meningkatnya akuntabilitas Dinas Tata Ruang dan Bangunan

Indikator kinerja tujuan :

- Persentase Realisasi Pola Pemanfaatan Ruang sesuai RTRW
- Presentase Penataan Bangunan dan Lingkungan sesuai dengan Rencana Bangunan dan Lingkungan;
- Nilai AKIP Dinas Tata Ruang dan Bangunan

Indikator kinerja Sasaran :

- Persentase Realisasi Pola Pemanfaatan Ruang sesuai RTRW
- Presentase Penataan Ruang yang Terselenggara;
- Presentase Penataan Bangunan dan Lingkungan sesuai dengan Rencana Bangunan dan Lingkungan;
- Persentase Pemanfaatan PBG yang sesuai peruntukannya;
- Nilai AKIP Dinas Tata Ruang dan Bangunan

DO :

- Luas Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kawasan Lindung / Rencana Peruntukan Kawasan Lindung pada RTRW Kabupaten Tangerang x 100%
- Luas Lahan Pengesahan Rencana Tapak / Rencana Peruntukan Sesuai RTR x 100%
- Jumlah Bangunan yang Tertata / Jumlah Bangunan dalam Rencana Penataan Kawasan x 100%
- Jumlah Konstruksi Bangunan Gedung Sesuai dengan Standar Teknis dalam PBG / Jumlah PBG yang Berlaku x 100%
- Nilai SAKIP Dinas Tata Ruang dan Bangunan

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2025

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	DO	Kondisi Kinerja (2024)	Target Capaian (2025)
1	Meningkatnya Kepatuhan Tata Ruang		Persentase Realisasi Pola Pemanfaatan Ruang sesuai RTRW	Luas Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kawasan Lindung / Rencana Peruntukan Kawasan Lindung pada RTRW Kabupaten Tangerang x 100%	37%	55%
2		Meningkatkan Kualitas Pemanfaatan Ruang	Presentase Penataan Ruang yang Terselenggara	Luas Lahan Pengesahan Rencana Tapak / Rencana Peruntukan Sesuai RTR x 100%	31%	39%
3		Meningkatkan Kualitas Penataan Bangunan dan Lingkungan	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan sesuai dengan Rencana Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Bangunan yang Tertata / Jumlah Bangunan dalam Rencana Penataan Kawasan x 100%	38%	49%
4		Meningkatkan Rasio Kepatuhan PBG Kab/Kota	Persentase Pemanfaatan PBG yang sesuai peruntukannya	Jumlah Konstruksi Bangunan Gedung Sesuai dengan Standar Teknis dalam PBG / Jumlah PBG yang Berlaku x 100%	95%	96%
5	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah		Nilai AKIP Dinas Tata Ruang dan Bangunan	Nilai SAKIP Dinas Tata Ruang dan Bangunan	80.99	81

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	DO	Kondisi Kinerja (2024)	Target Capaian (2025)
		Meningkatnya akuntabilitas Perangkat Daerah	Nilai AKIP Dinas Tata Ruang dan Bangunan	Nilai SAKIP Dinas Tata Ruang dan Bangunan	80,99	81

Target Indikator Kinerja Utama
Dinas Tata Ruang Dan Bangunan Kabupaten Tangerang
Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
1	Persentase Realisasi Pola Pemanfaatan Ruang sesuai RTRW	%	55%
2	Presentase Penataan Ruang yang Terselenggara	%	39%
3	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan sesuai dengan Rencana Bangunan dan Lingkungan	%	49%
4	Persentase pemanfaatan PBG yang sesuai peruntukannya	%	96%
5	Nilai AKIP OPD	Angka	81

3.2 Program dan Kegiatan OPD Tahun 2025

Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kabupaten Tangerang mempunyai urusan Bangunan yang diuraikan melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

3.2.1. Program terdiri :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Penataan Bangunan Gedung;
3. Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya
4. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

3.2.2. Kegiatan dan Sub kegiatan terdiri :

1. Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
b. Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Rka-Skpd
c. Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Perubahan Rka-Skpd
d. Koordinasi Dan Penyusunan Dpa-Skpd
e. Koordinasi Dan Penyusunan Perubahan Dpa-Skpd
f. Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd
g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   a. Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asn
   b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas Asn
   c. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
   d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
   e. Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran Skpd
3. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah
   a. Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada Skpd
4. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
   a. Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah
5. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
   a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
   b. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
6. Administrasi Umum Perangkat Daerah
   a. Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
   b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
   c. Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
   d. Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan
   e. Fasilitasi Kunjungan Tamu
   f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd
   g. Penatausahaan Arsip Dinamis Pada Skpd
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   a. Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
   b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan
   b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan
   c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
   d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
   e. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

9. Penyelenggaraan Bangunan Gedung Di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (Imb) Dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
   a. Pendaftaran Huruf Daftar Nomor (HDNo) Bangunan Gedung Negara
   b. Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
   c. Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung
   d. Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota
   e. Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
   f. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung
   g. Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (Imb), Sertifikat Laik Fungsi (Slf), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (Tabg), Pendataan Bangunan Gedung, Serta Implementasi Simbg
10. Penyelenggaraan Penataan Bangunan Dan Lingkungannya Di Daerah Kabupaten/Kota
   a. Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya
   b. Supervisi Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya
   c. Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
11. Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota
   a. Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang
   b. Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota
   c. Pelaksanaan Evaluasi dan Konsultasi Evaluasi RTRW Kabupaten/Kota
   d. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang
   e. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota
12. Koordinasi Dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
   a. Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang
   b. Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
   c. Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang
13. Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
   a. Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang

b. Pengawasan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang
c. Pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal

BAB IV
PENUTUP

Dengan ditetapkannya Rencanan Kerja Perubahan Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kabupaten Tangerang Tahun 2025 melalui Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai dalam Rencana Strategis Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026, merupakan keputusan mendasar yang dinyatakan secara garis-garis besar, sebagai acuan operasional pelaksanaan kegiatan pada penyelenggaraan secara tepat dan mencapai sasaran.

Dalam upaya membangun sistem akuntabilitas dan kinerja untuk penetapan Rencana Kerja ini diperlukan proses penyusunan konsep dasar pengukuran dan perumusan indikator kinerja. Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja ini, bukan hanya ditentukan dalam proses penyusunannya, akan tetapi lebih banyak dipengaruhi oleh implementasi atau penerapannya.

Semoga Rencana Kerja Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kabupaten Tangerang Tahun 2025 ini dapat memberikan pedoman dan arah pelaksanaan kegiatan pembangunan yang akan ditangani bersama dengan seluruh unit kerja dalam lingkungan Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kabupaten Tangerang.

12. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Renja Perangkat Daerah adalah suatu rencana jangka pendek atau satu tahunan yang bersifat menyeluruh, memberikan rumusan kemana organisasi akan diarahkan, dan bagaimana pemberdayaan sumber daya yang dialokasikan untuk mencapai tujuan, selama jangka waktu satu tahun. Renja Perangkat Daerah juga merupakan suatu proses pemilihan tujuan-tujuan organisasi, penentuan strategi, kebijakan, program-program strategi yang diperlukan untuk tujuan-tujuan tersebut. Dengan adanya Renja Perangkat Daerah ini maka konsep organisasi menjadi jelas sehingga akan memudahkan dalam memformulasikan sasaran serta rencana-rencana lain dan dapat mengarahkan sumber daya-sumber daya organisasi secara efektif.

Renja Perubahan Tahun 2025 merupakan Tahun kedua dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah kabupaten Tangerang dan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tangerang periode Tahun 2025-2029. Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 ini merupakan salah satu acuan dalam pencapaian target kinerja indikator yang telah di susun dalam Renstra dan RPJMD baik indikator Daerah maupun indikator Perangkat Daerah. Oleh karena itu, Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah harus berkualitas dan mendukung pencapaian target indikator kinerja kunci lingkup bidang urusan perencanaan pembangunan dan statistik yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tahun 2025-2029.

Renja Perangkat Daerah memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja Perangkat Daerah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tangerang merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun melalui proses inventarisasi, klasifikasi, sinkronisasi, dan seleksi usulan program/kegiatan yang terpadu dalam Forum Renja Perangkat Daerah. Penyusunan Renja Perangkat Daerah dilaksanakan dengan pendekatan *bottom up planning, top down planning* dan partisipatif sebagai kerangka landasan filosofi, serta dilakukan petahapan yaitu persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah, Penyusunan Rancangan awal Renja Perangkat Daerah, Penyusunan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah dan Penetapan Renja Perangkat Daerah.

Rencana Kerja BPBD Kabupaten Tangerang Perubahan Tahun Anggaran 2025 ini secara khusus membahas konsep rencana pembangunan yang akan dilaksanakan, sehingga akan berfungsi sebagai wahana untuk menyamakan persepsi, membangun komitmen bersama dan memaduserasikan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan pembangunan baik yang berskala nasional maupun berskala daerah. Secara umum, Rencana Kerja BPBD Kabupaten Tangerang Perubahan tahun 2025 memuat kerangka rencana pembangunan dan kerangka anggaran yang dirinci menurut alokasi pendanaan/pagu indikatif yang

akan digunakan. Dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan adanya penyempurnaan sistem perencanaan, baik pada aspek proses dan mekanisme maupun tahapan pelaksanaan musyawarah perencanaan di tingkat pusat dan daerah wajib menyusun dokumen perencanaan.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tangerang Perubahan Tahun 2025 disusun berdasarkan kepada :

1. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
3. UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Permendagri Nomor 21 Th 2011 tentang Perubahan Permendagri no 13 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Permendagri No 22 Th 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Permendagri No 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
10. Permendagri No. 114 Tahun 2014 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kab Tangerang No 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 16 Tahun 2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2019;
14. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 59 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan RKA,DPA,RDPPA,DPPA dan DPAL Tahun Anggaran 2019;
15. Peraturan Bupati Tangerang No 32 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tangerang;
16. Peraturan Bupati Tangerang No 39 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029.
17. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 36 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Biaya Umum Tahun Anggaran 2025;
18. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Perubahan Bupati Nomor 16 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dalam penyusunan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tangerang Perubahan Tahun 2025 adalah:

1. Sebagai dokumen perencananaan tahunan pada Perangkat Daerah yang merupakan bagian dari upaya perwujudan tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana tertuang dalam dokumen Renstra Tahun 2025-2029.
2. Sebagai dokumen perencanaan yang menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) perubahan Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2025;
3. Tersedianya program dan kegiatan yang dapat dijadikan pedoman oleh seluruh jajaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tangerang dalam mewujudkan optimalisasi kinerja;
4. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada tahun anggaran berjalan;

Berdasarkan maksud di atas, tujuan yang hendak dicapai dari penyusunan rencana kerja peruabahan tahunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2025 adalah:

1. Memberikan arah pada target pencapaian tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam bidang Penanggulangan Bencana dan Kebakaran.
2. Sebagai dasar dan tolok ukur evaluasi kinerja Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tangerang;
3. Untuk menjamin penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien dan berkelanjutan;
4. Untuk menjamin terciptanya sinkronisasi dan sinergi internal antar seluruh jajaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tangerang.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Kerja Tahunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tangerang Perubahan Tahun 2025, sistematikanya disusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari : Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penulisan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

Bab ini terdiri dari : Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 dan Capaian Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tangerang, Analisis Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tangerang, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana

Daerah Kabupaten Tangerang, Review terhadap Raancangan Awal RKPD dan Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Bab ini terdiri dari : Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 dalam bentuk pagu indikatif atas program, kegiatan dan sub kegiatan.

BAB IV PENUTUP

Bab ini terdiri dari rangkaian kalimat penutup Rencana Kerja Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tangerang 2025.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 dan Capaian Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2024-2026

Evaluasi Pelaksanaan Renja Perubahan Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tangerang adalah penjabaran dari Rencana Kerja Tahunan yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tangerang sebagai Pelaksana Teknis pembangunan melalui pemerataan dan kualitas infrastruktur di bidang bencana dan kebakaran.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tangerang sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tangerang sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 meliputi kebijakan perencanaan program & kegiatan, dan pelaksanaan rencana program & kegiatan. Berdasarkan program dan kegiatan yang ada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tangerang telah melaksanakan sejumlah kegiatan melalui program yang ada dengan dana APBD Tahun 2025 sebesar Rp43.369.043.801,- dan Perubahan Anggaran sebesar Rp 44.215.919.916,00,-. Berikut ini adalah realisasi anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025 sampai dengan triwulan II :

Tabel 2.1
Capaian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2025

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Capaian (%)	Realisasi Fisik Kegiatan (%)	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Satuan	Target indikator	Realisasi Indikator	Capaian (%)
1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**									
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	34.494.874.251	13.628.427.133	39,51%	40%	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	%	100	100	100%
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	155.443.800	17.950.000	11,55%	15%	Persentase Ketersediaan Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	%	100	100	100%
1.05.01.2.01.0001	*Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	87.375.800	13.300.000	15,22%	15%	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4	4	100%
1.05.01.2.01.0006	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	68.068.000	4.650.000	6,83%	15%	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	1	100%
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	24.276.906.233	9.884.156.206	40,71%	50%	Persentase pemenuhan administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	100	100%
1.05.01.2.02.0001	*Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	24.267.226.233	9.883.656.206	40,73%	50%	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	90	90	100%
1.05.01.2.02.0007	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD*	9.680.000	500.000	5,17%	10%	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	1	1	100%
1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	6.800.000	0	0.00 %	0.00 %	Persentase Ketersediaan Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah	%	100	100	100%

1.05.01.2.03.0001	*Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD*	6.800.000	0	0.00 %	0.00 %	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	1	100%
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	175.662.000	0	0.00 %	0.00 %	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	%	-	-	
1.05.01.2.05.0002	*Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya*	175.662.000	0	0.00 %	0.00 %	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	-	-	
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	719.170.300	174.964.100	24,33%	25%	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	100	100%
1.05.01.2.06.0001	*Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*	43.958.000	0	0.00 %	0.00 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100%
1.05.01.2.06.0002	*Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	248.754.200	0	0.00 %	0.00 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100%
1.05.01.2.06.0003	*Penyediaan Peralatan Rumah Tangga*	37.980.000	23.032.500	60,64%	0.00 %	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	1	100%
1.05.01.2.06.0004	*Penyediaan Bahan Logistik Kantor*	86.133.100	84.600.100	98,22%	100%	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100%
1.05.01.2.06.0005	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	33.560.000	1.893.300	5,64%	10%	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	100%
1.05.01.2.06.0008	*Fasilitasi Kunjungan Tamu*	60.900.000	28.260.000	46,40%	50%	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	1	100%
1.05.01.2.06.0009	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	207.885.000	37.178.200	17,88%	25%	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	1	100%
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	152.307.000	0	0.00 %	0.00 %	Presentase pemenuhan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	100	100%
1.05.01.2.07.0005	*Pengadaan Mebel*	80.028.000	0	0.00 %	0.00 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	100	100	100%
1.05.01.2.07.0010	*Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	72.279.000	0	0.00 %	0.00 %	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	10	10	100%
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.828.526.340	2.837.907.877	41,56%	50%	Persentase pemenuhan Jasa Penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	100	100%
1.05.01.2.08.0001	*Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	48.060.000	0	0.00 %	0.00 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	6	6	100%

1.05.01.2.08.0002	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	585.270.772	203.419.377	34,76%	45%	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	6	6	100%
1.05.01.2.08.0004	*Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	6.195.195.568	2.634.488.500	42,52%	50%	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	6	6	100%
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.180.058.578	713.448.950	32,73%	50%	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	100	100%
1.05.01.2.09.0001	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan*	188.009.964	45.430.200	24,16%	35%	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	15	15	100%
1.05.01.2.09.0002	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	1.525.454.156	509.617.150	33,41%	50%	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	50	50	100%
1.05.01.2.09.0006	*Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	159.330.000	21.659.000	13,59%	25%	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	40	40	100%
1.05.01.2.09.0009	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*	307.264.458	136.742.600	44,50%	50%	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5	5	100%
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.541.217.550	703.346.264	45,64%	50%	Persentase Jumlah Penduduk di Kawasan Rawan Bencana yang Memperoleh Informasi Rawan Bencana seuai Jenis Ancaman Bencana	%	100	100	100%
						Persentase Korban Bencana yang Mendapat Layanan Penyelamatan dan Evakuasi	%	100	100	100%
						Indeks Ketangguhan Desa (IKD) : 1.1 Desa Kelurahan tangguh bencana madya	Desa	100	100	100%
1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	162.603.800	4.203.000	2,58%	5%	Persentase Jumlah Penduduk di Kawasan Rawan Bencana yang Memperoleh Informasi Rawan Bencana seuai Jenis Ancaman Bencana	%	100	100	100%

1.05.03.2.01.0007	*Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)*	67.914.300	0	0.00 %	0.00 %	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	Orang	-	-	
1.05.03.2.01.0008	*Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota*	94.689.500	4.203.000	4,44%	5%	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Dokumen	1	1	100%
1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	576.118.850	147.372.564	25,58%	25%	Persentase pemenuhan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100	100	100%
1.05.03.2.02.0013	*Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota*	23.838.500	0	0.00 %	0.00 %	Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani	Kegiatan	-	-	
1.05.03.2.02.0015	*Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota*	105.362.400	105.147.564	99,80%	100%	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	Unit	50	50	100%
1.05.03.2.02.0018	*Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota*	83.075.000	37.750.000	50%	50%	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota	Orang	250	250	100%

1.05.03.2.02.0021	*Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota*	51.454.700	0	0.00 %	0.00 %	Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	Orang	-	-	
1.05.03.2.02.0022	*Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota*	66.761.000	0	0.00 %	0.00 %	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Dokumen	-	-	
1.05.03.2.02.0026	*Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota*	79.760.000	0	0.00 %	0.00 %	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	Laporan	-	-	
1.05.03.2.02.0027	*Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota*	127.253.500	4.475.000	3,52%	100%	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Dokumen	1	1	100%
1.05.03.2.02.0028	*Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota*	38.613.750	0	0.00 %	0.00 %	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	Kawasan	-	-	100%
1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	626.678.000	536.173.700	85,56%	50%	Persentase ketercapaian pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100	100	100%
1.05.03.2.03.0002	*Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota*	9.708.000	3.025.000	31,16%	50%	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	Dokumen	1	1	100%
1.05.03.2.03.0003	*Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota*	32.400.000	2.703.000	8,34%	10%	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	Orang	50	50	100%

1.05.03.2.03.0009	*Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota*	584.570.000	530.445.700	90,74%	95%	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Orang	17000	17000	100%
1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	175.816.900	15.597.000	8,87%	10%	Persentase pelayanan Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	%	100	100	100%
1.05.03.2.04.0001	*Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota*	13.077.500	4.105.000	31,39%	50%	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	Dokumen	1	1	100%
1.05.03.2.04.0003	*Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota*	55.019.500	0	0.00 %	0.00 %	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Dokumen	-	-	
1.05.03.2.04.0004	*Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan*	24.804.500	0	0.00 %	0.00 %	Jumlah Data dan InformasiKebencanaan yang tersedia	Dokumen	-	-	
1.05.03.2.04.0010	*Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota*	16.427.900	11.492.000	69,95%	75%	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	Kegiatan	1	1	
1.05.03.2.04.0014	*Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota*	66.487.500	0	0.00 %	0.00 %	Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Dokumen	-	-	
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	7.332.952.000	511.409.000	6,97%	10%	Persentase Korban Kebakaran dan Non Kebakaran yang Mendapat Layanan Pencegahan, Penyelamatan dan Evakuasi	%	100	100	100%
1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	7.159.654.000	483.642.000	6,76%	10%	Persentase ketercapaian pelayanan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	%	100	100	100%

1.05.04.2.01.0001	*Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota*	22.152.000	0	0.00 %	0.00 %	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	Dokumen	1	1	100%
1.05.04.2.01.0002	*Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota*	16.868.000	1.752.000	10,39%	15%	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	1	1	100%
1.05.04.2.01.0003	*Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran*	919.018.000	380.000.000	41,35%	50%	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	Dokumen	1	1	100%
1.05.04.2.01.0004	*Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota*	182.385.000	0	0.00 %	0.00 %	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	100%
1.05.04.2.01.0007	*Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran*	249.647.000	0	0.00 %	0.00 %	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Orang	100	100	100%
1.05.04.2.01.0017	*Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri*	5.765.790.000	101.890.000	1,77%	15%	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Unit	10	10	100%
1.05.04.2.01.0018	*Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran*	3.794.000	0	0.00 %	0.00 %	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Dokumen	-	-	100%

1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	26.172.500	0	0.00 %	0.00 %	Persentase pelaksanaan pendataan dan penilaian peralatan proteksi kebakaran	%	100	100	100%
1.05.04.2.02.0001	*Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran*	18.840.000	0	0.00 %	0.00 %	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	Dokumen	1	1	100%
1.05.04.2.02.0002	*Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran*	7.332.500	0	0.00 %	0.00 %	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Dokumen	-	-	
1.05.04.2.03	Investigasi Kejadian Kebakaran	14.670.000	0	0.00 %	0.00 %	Persentase penyelesaian investigasi penyebab terjadinya kebakaran	%	100	100	100%
1.05.04.2.03.0001	*Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran*	14.670.000	0	0.00 %	0.00 %	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian dan Penelitian	Dokumen	1	1	100%
1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	104.424.000	0	0.00 %	0.00 %	Persentase pemberdayaan masyarakat yang berpartisipasi dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi	%	-	-	
1.05.04.2.04.0001	*Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat*	19.179.000	0	0.00 %	0.00 %	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	Orang	-	-	
1.05.04.2.04.0002	*Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran*	71.765.000	0	0.00 %	0.00 %	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	Desa/Kelurahan	-	-	

1.05.04.2.04.0003	*Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana*	13.480.000	0	0.00 %	0.00 %	Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar	Dokumen	-	-	
1.05.04.2.05	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	28.031.500	27.767.000	99,06%	100%	Persentase pemenuhan aparatur yang mengikuti pembinaan pencarian dan pertolongan terhadap penyelamatan dan evakuasi	%	100	100	100%
1.05.04.2.05.0004	*Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi*	28.031.500	27.767.000	99,06%	100%	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal	Laporan	1	1	100%

Tabel 2.2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah s.d Tahun 2025

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan *(output)*	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s.d tahun 2024	
					Target Renja SKPD tahun 2023	Realisasi Renja SKPD tahun 2023	Ringkasan Realisasi		Realisasi Capaian Program dab Kegiatan s.sd. Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/4
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT									
1.05.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100,00**	**100,00**
1.05.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	6	6	6	6	**100**	6	6,00	100,00
		Persentase Ketersediaan Dokumen perencanaan dan Pelaporan	100	100	100	100	**100**	100	**100,00**	**100,00**
1.05.01.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	6	6	6	**100**	6	**6,00**	**100,00**
1.05.01.2.01.06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	2	2	2	**100**	2	**2,00**	**100,00**
1.05.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	laporan keuangan, gaji dan tunjangan ASN	3	3	3	3	**100**	3	**3,00**	**100,00**
		Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	100	100	100	**100**		**66,67**	**66,67**

1.05..01.2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	89	90	91	91	**100**	92	**91,00**	**102,25**
1.05.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5	5	5	5	**100**	5	**5,00**	**100,00**
1.05.01.2.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	dokumen rencana kebutuhan barang milik daerah pada perangkat daerah	1	1	1	1	**100**	1	**1,00**	**100,00**
		Persentase Ketersediaan Dokumen Laporan Barang Milik Daerah	100	100	100	100	**100**	100	**100,00**	**100,00**
1.05..01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	1	1	1	**100**	1	**1,00**	**100,00**
1.05.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	1	1	1	1	**100**	1	**1,00**	**100,00**
		Prosentase aparatur yang meningkat kapasitasnya	100	100	100	100	**100**		**66,67**	**66,67**
1.05.01.2.05.02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	0	1	1	**100**	1	**0,67**	**66,67**
1.05.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	laporan kegiatan administrasi umum perangkat daerah	1		1	1	**100**	1	**0,67**	**66,67**
		Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	100	100	100	**100**		**66,67**	**66,67**
1.05.01.2.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1	1	1	**100**	1	**1,00**	**100,00**
1.05.01.2.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	1	1	1	**100**	1	**1,00**	**100,00**
1.05.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	1	1	1	**100**	1	**1,00**	**100,00**

1.05.01.2.06.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	1	1	1	**100**	1	**1,00**	**100,00**
1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	1	1	1	**100**	1	**1,00**	**100,00**
1.05.01.2.06.08	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4	4	4	4	**100**	4	**4,00**	**100,00**
1.05.01.2.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4	4	4	4	**100**	4	**4,00**	**100,00**
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	laporan pengadaan barang milik daerah	1	1	1	1	**100**	1	**1,00**	**100,00**
		Persentase pemenuhan barang milik daerah	100	100	100	100	**100**	100	**100,00**	**100,00**
1.05.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	100	0	50	50	**100**	50	**33,33**	**33,33**
1.05.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4	4	4	4	**100**	4	**4,00**	**100,00**
1.05.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan kegiatan penyediaan jasa penunjang	3	3	3	3	**100**	3	**3,00**	**100,00**
		Persentase pemenuhan Jasa Penunjang	100	100	100	100	**100**	100	**100,00**	**100,00**
1.05.01.2.08.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	1	1	1	**100**	1	**1,00**	**100,00**
1.05.01.2.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	1	1	1	**100**	1	**1,00**	**100,00**
1.05.01.2.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	12	12	**100**	12	**12,00**	**100,00**
1.05.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang penunjang urusan pemerintahan daerah	4	4	4	4	**100**	4	**4,00**	**100,00**

		Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100	100	100	100	**100**	100	**100,00**	**100,00**
1.05.01.2.09.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	63	59	59	59	**100**	61	**59,67**	**94,71**
1.05.01.2.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	63	59	59	59	**100**	61	**59,67**	**94,71**
1.05.01.2.09.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	96	96	96	96	**100**	96	**96,00**	**100,00**
1.05.01.2.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	2	2	2	**100**	2	**2,00**	**100,00**
1.05.03	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**1. Indeks Ketangguhan Desa (IKD) : 1.1 Desa Kelurahan tangguh bencana madya**	91	**0**	0	0	**0**	0	**0,00**	**0,00**
		1.2 Desa Kelurahan tangguh bencana utama	0	**0**	0	0	**0**	0	**0,00**	**0,00**
		2. Persentase Jumlah Penduduk di Kawasan Rawan Bencana yang Memperoleh Informasi Rawan Bencana seuai Jenis Ancaman Bencana	100	86	95	96	**101,05263**	100	**94,00**	**94,00**
		3. Persentase Korban Bencana yang Mendapat Layanan Penyelamatan dan Evakuasi	100	100	100	100	**100**	100	**100,00**	**100,00**
1.05.03.2.01	Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	laporan pelayanan informasi rawan bencana	1	1	1	1	**100**	1	**1,00**	**100,00**
		Persentase Jumlah Penduduk di Kawasan Rawan Bencana yang Memperoleh Informasi Rawan Bencana seuai Jenis Ancaman Bencana	100	100	100	100	**100**	100%	**67,00**	**67,00**

1.05.03.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	1		1	1	**100**	1	**0,67**	**66,67**
1.05.03.2.01.02	Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	455	53	112	112	**100**	222	**129,00**	**28,35**
1.05.03.2.02	Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	laporan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	6	6	6	6	**100**	6	**6,00**	**100,00**
		Persentase pemenuhan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100	100	100	100	**100**	100	**100,00**	**100,00**
1.05.03.2.02.01	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi	0		1	1	**100**	1	**0,67**	**#DIV/0!**
1.05.03.2.02.02	Sub Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	455	100	100	100	**100**	100	**100,00**	**21,98**
1.05.03.2.02.03	Sub Kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	1	1	1	1	**100**	1	**1,00**	**100,00**
1.05.03.2.02.04	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	100	50	50	50	**100**	100	**66,67**	**66,67**
1.05.03.2.02.05	Sub Kegiatan Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana	1	1	1	1	**100**	1	**1,00**	**100,00**
1.05.03.2.02.08	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	100	100	100	100	**100**	100	**100,00**	**100,00**

1.05.03.2.02.09	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	3	1	1	1	**100**	1	**1,00**	**33,33**
1.05.03.2.02.10	Sub Kegiatan Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	200	0	150	150	**100**	150	**100,00**	**50,00**
1.05.03.2.03	Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	laporan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	2	2	2	2	**100**	2	**2,00**	**100,00**
		Persentase ketercapaian pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	100	100	100	**100**	100	**100,00**	**100,00**
1.05.03.2.03.03	Sub Kegiatan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korbana Kabupaten/kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	100	50	60	60	**100**	50	**53,33**	**53,33**
1.05.03.2.03.04	Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1000	500	1000	1000	**100**	1000	**833,33**	**83,33**
1.05.03.2.04	Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	laporan penataan sistem dasar penanggulangan bencana	5	2	2	2	**100**	4	**2,67**	**53,33**
		Persentase pelayanan Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	100%		100%	100%	**100**	100%	**0,67**	**66,67**
1.05.03.2.04.01	Sub Kegiatan Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	2		2	2	**100**	2	**1,33**	**66,67**
1.05.03.2.04.02	Sub Kegiatan Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	3		2	2	**100**	2	**1,33**	**44,44**
1.05.03.2.04.03	Sub Kegiatan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	3		3	3	**100**	3	**2,00**	**66,67**
1.05.03.2.04.04	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan	1		1	1	**100**	1	**0,67**	**66,67**
1.05.03.2.04.06	Sub Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi	1		1	1	**100**	1	**0,67**	**66,67**

		Pasca Bencana (R3P)								
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Korban Kebakaran dan non kebakaran yang mendapat Layanan Penyelamatan dan Evakuasi	100	100	100	100	**100**	100	**100,00**	**100,00**
		Jumlah masyarakat yang mendapat layanan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran	1500	1000	1200	1200	**100**	1500	**1233,33**	**82,22**
1.05.04.2.01	Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	laporan pelayanan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	5	3	4	4	**100**	5	**4,00**	**80,00**
		Persentase ketercapaian pelayanan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	100	100	100	100	**100**	100	**100,00**	**100,00**
1.05.04.2.01.01	Sub Kegiatan Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	1	1	1	1	**100**	1	**1,00**	**100,00**
1.05.04.2.01.02	Sub Kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1	1	1	1	**100**	1	**1,00**	**100,00**
1.05.04.2.01.03	Sub Kegiatan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	1	1	1	1	**100**	1	**1,00**	**100,00**
1.05.04.2.01.04	Sub Kegiatan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota	1	0	1	0	**0**	1	**0,33**	**33,33**

1.05.04.2.01.06	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	50	50	50	50	**100**	50	**50,00**	**100,00**
1.05.04.2.01.07	Sub Kegiatan Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	60	0	60	60	**100**	60	**40,00**	**66,67**
1.05.04.2.01.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	1	1	1	1	**100**	1	**1,00**	**100,00**
1.05.04.2.02	Kegiatan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Data/Dokumen Inspeksi Peralatan Prooteksi Kebakaran	2	0	2	2	**100**	2	**1,33**	**66,67**
		Persentase pelaksanaan pendataan dan penilaian peralatan proteksi kebakaran	100	100	100	100	**100**	100	**100,00**	**100,00**
1.05.04.2.02.01	Sub Kegiatan Pendataan sarana prasarana proteksi kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	1	0	1	0	**0**	1	**0,33**	**33,33**
1.05.04.2.02.02	Sub Kegiatan Penilaian sarana prasarana proteksi kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	1	0	1	0	**0**	1	**0,33**	**33,33**
1.05.04.2.03	Kegiatan Investigasi Kejadian Kebakaran	Data/Dokumen Investigasi Kejadian Kebakaran	1	0	1	1	**100**	1	**0,67**	**66,67**
		Persentase penyelesaian investigasi penyebab terjadinya kebakaran	100	100	100	100	**100**	100	**100,00**	**100,00**
1.05.04.2.03.01	Sub Kegiatan Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian dan Penelitian	1	0	1	1	**100**	1	**0,67**	**66,67**
1.05.04.2.04	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	laporan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran	3	1	3	3	**100**	3	**2,33**	**77,78**

		Persentase pemberdayaan masyarakat yang berpartisipasi dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi	100	100	100	100	**100**	100	**100,00**	**100,00**
1.05.04.2.04.01	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	120	90	90	90	**100**	100	**93,33**	**77,78**
1.05.04.2.04.02	Sub Kegiatan Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	92	0	0	0	**0**	91	**30,33**	**32,97**
1.05.04.2.04.03	Sub Kegiatan Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana	Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar	1	0	1	1	**100**	1	**0,67**	**66,67**
1.05.04.2.05	kegiatan Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	laporan hasil Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	1	0	1	1	**100**	1	**0,67**	**66,67**
		Persentase pemenuhan aparatur yang mengikuti pembinaan pencarian dan pertolongan terhadap penyelamatan dan evakuasi	100	100	100	100	**100**	100	**100,00**	**100,00**
1.05.04.2.05.04	Sub Kegiatan Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal	1	1	1	1	**100**	1	**1,00**	**100,00**

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

BPBD Kabupaten Tangerang merupakan perangkat daerah tipe B memiliki tugas dan fungsi berdasarkan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 32 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang penanganan bencana dan kebakaran. Dalam melaksanakan Tugas pokok sebagaimana dimaksud Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi:

a. Penyusunan kebijakan teknis penanggulangan bencana;
b. Pelaksanaan dukungan teknis penanggulangan bencana;
c. Pelaksanaan pemantauan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bencana;
d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan Pemerintah Daerah sesuai lingkup tugasnya;
e. Pelaksanan fungsi lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

BPBD melakukan kegiatan pelayanan kepada masyarakat yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, yaitu Pelayanan Informasi Rawan Bencana, Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana dan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota yaitu Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran. Jenis pelayanan BPBD Kabupaten Tangerang masuk ke dalam bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, yaitu :

1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana
2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
3. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
4. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran

Berikut ini adalah penerapan SPM sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Tangerang :

Tabel 2.3
Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tangerang

No	Jenis Pelayanan	Program Perangkat Daerah Terkait Pelayanan Pelaksanaan Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Program	Perangkat Daerah Pelaksana
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Program Penanggulangan Bencana	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	BPBD
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana		Jumlah desa dan kelurahan yang tanggap bencana	BPBD
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		Persentase korban bencana yang mendapat layaan penyelamatan dan evakuasi	BPBD
4	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase penanganan kebakaran dalam kurun waktu *respon time* 15 menit	BPBD

1. Pelayanan informasi rawan bencana adalah pelayanan informasi tentang bagian wilayah kabupaten/kota rawan bencana, kepada Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang berpotensi terpapar bencana. Cakupan kawasan rawan bencana adalah wilayah kabupaten/kota. Pelayanan informasi rawan bencana dibagi per jenis ancaman bencana antara lain sebagai berikut: Gempa bumi, Tsunami, Banjir, Tanah Longsor, Letusan Gunung Api, Gelombang Laut Ekstrim, Angin Topan (termasuk Siklon Tropis/Puting Beliung), Kekeringan, Kebakaran Hutan dan Lahan, dan Epidemi/Wabah Penyakit/Zoonosis Prioritas diantaranya: rabies, anthrax, leptospirosis, brucellosis dan avian influenza (flu burung). Informasi rawan bencana sangat penting diberikan kepada Warga Negara agar diketahui ancaman bencana dapat terjadi dan dapat membahayakan keselamatan manusia pada suatu wilayah dan waktu tertentu.

2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana adalah serangkaian kegiatan prabencana melalui pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan pemerintah daerah dan Warga Negara dalam menghadapi bencana. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan dibagi per jenis ancaman bencana yang dirincikan antara lain: Gempa Bumi, Tsunami, Banjir, Tanah Longsor, Letusan Gunung Api, Gelombang Laut Ekstrim, Angin Topan (termasuk Siklon Tropis/Puting Beliung), Kekeringan, Kebakaran Hutan dan Lahan, dan Epidemi/Wabah Penyakit/Zoonosis Prioritas diantaranya: rabies, anthrax, leptospirosis, brucellosis dan avian influenza (flu burung). Pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan terhadap bencana sangat dibutuhkan sebagai upaya untuk mengurangi dampak bencana, terutama korban jiwa manusia pada suatu wilayah dan waktu tertentu.
3. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dan menyelamatkan korban bencana. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan dibagi per jenis ancaman bencana antara lain: Gempa Bumi, Tsunami, Banjir, Tanah Longsor, Letusan Gunung Api, Gelombang Laut Ekstrim, Angin Topan (termasuk Siklon Tropis/Puting Beliung), Kekeringan, Kebakaran Hutan dan Lahan, dan Epidemi/Wabah Penyakit/Zoonosis Prioritas. Khusus untuk penanganan Epidemi/Wabah Penyakit/Zoonosis Prioritas diantaranya: rabies, anthrax, leptospirosis, brucellosis dan avian influenza (flu burung). Keselamatan jiwa manusia sangat penting dalam proses penanganan darurat bencana maka untuk itu dibutuhkan upaya penyelamatan dan evakuasi korban bencana sesegera mungkin.
4. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera sesuai dengan tingkat waktu tanggap (*response time*) pada saat dan setelah kejadian kebakaran bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran dan yang terdampak kebakaran, yang meliputi kegiatan pemadaman, pengendalian, penyelamatan dan evakuasi. Korban kebakaran adalah Korban jiwa adalah warga negara yang menerima akibat kejadian kebakaran (korban jiwa langsung) dan warga negara yang terdampak kejadian kebakaran (korban jiwa terdampak) yaitu mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, dan/atau mengalami trauma, serta dampak sosial. Korban harta benda adalah harta benda warga negara yang terkena akibat kejadian kebakaran (korban harta benda langsung) dan harta benda warga negara yang terdampak kejadian kebakaran (korban harta benda terdampak) yang meliputi musnah dan/atau rusaknya harta benda, dampak ekonomi, dan kerusakan lingkungan.

Tingkat waktu tanggap (*response time*) adalah waktu minimal yang diperlukan dimulai saat menerima informasi dari warga negara/penduduk, sampai tiba di tempat kejadian, serta langsung melakukan tindakan yang diperlukan secara cepat dan tepat sasaran di lokasi kejadian kebakaran dan/atau operasi penyelamatan (non kebakaran). Secara operasional, waktu tanggap pemenuhan layanan pemadaman serta penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran merupakan nilai rata-rata capaian waktu tanggap sejak mulai diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap melakukan operasional pemadaman yang dilakukan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan ataupun oleh relawan kebakaran

atau komunitas masyarakat lainnya yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Pemerintah Daerah secara formal.

Pembentukan dan/atau pembinaan relawan kebakaran merupakan bentuk pemberdayaan masyarakat oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah, sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan sub urusan kebakaran. Pemberdayaan masyarakat ini penting mengingat kondisi geografis dan persebaran permukiman dan penduduk pada daerah-daerah di Indonesia serta sebagai salah satu upaya menutup keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam penyelenggaraan sub urusan kebakaran. Relawan kebakaran atau komunitas masyarakat lainnya dimaksud harus tercatat dan diformalkan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah, setidaknya melalui pemberian tanda pengenal relawan kebakaran.

Selain layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban, terdapat jenis layanan penunjang lainnya yang secara faktual melekat pada tugas pemadam kebakaran dan penyelamatan. Layanan penunjang tersebut menjadi daya dukung pencapaian target SPM di daerah serta merupakan amanat dari peraturan perundang-undangan. Layanan penunjang dimaksud adalah Layanan Penyelamatan dan Evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat nonkebakaran) yaitu peristiwa yang menimpa, membahayakan, dan/atau mengancam keselamatan manusia selain kejadian kebakaran. Jenis dari operasi darurat nonkebakaran yang selama ini dilakukan misalnya adalah penanganan banjir, evakuasi korban hanyut, evakuasi korban terjatuh ke sumur, penanganan pohon tumbang, evakuasi sarang tawon, penanganan penyelamatan hewan yang berdampak pada keselamatan manusia (animal rescue), dan lain-lain. Layanan Penyelamatan dan Evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) dilakukan dengan segera sejak menerima laporan/informasi dan penanganannya disesuaikan dengan jenis kondisi darurat yang dilayani. Pemenuhan layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi dilakukan melalui penyediaan sarana prasarana pemadam kebakaran, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi, pemenuhan aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan yang memenuhi standar kompetensi, pembentukan pos pemadam kebakaran di setiap kecamatan/kelurahan, serta dengan meningkatkan kegiatan pencegahan dengan mengedepankan pengurangan risiko kebakaran.

Pemenuhan mutu pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran di kabupaten/kota dicapai melalui capaian tingkat waktu tanggap (*response time*) penanggulangan kejadian kebakaran, layanan pelaksanaan pemadaman dan pengendalian kebakaran, layanan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi, layanan pemberdayaan masyarakat/relawan kebakaran, serta layanan pendataan, inspeksi dan investigasi pasca kebakaran. Layanan Pemadaman serta Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan terdampak kebakaran dimaksud wajib dilaksanakan oleh daerah kabupaten/kota sebesar 100% (seratus persen) setiap tahunnya. Dengan kata lain, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah hadir memberikan layanan pada setiap kejadian kebakaran.

Berikut ini adalah capaian kinerja BPBD Kabupaten Tangerang :

Tabel 2.4
Capaian Kinerja SPM BPBD Kabupaten Tangerang

No	Jenis Pelayanan Dasar	Realisasi Capaian (%)			Perangkat Daerah Pelaksana
		2023	2024	2025	
1	Pelayanan informasi rawan bencana	100	100	100	BPBD
2	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100	100	100	BPBD
3	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	100	100	BPBD
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100	100	100	BPBD

Berdasarkan pelayanan SPM tersebut, BPBD Kabupaten Tangerang menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam dokumen RPJMD dan Renstra Tahun 2025-2029 yaitu :

Tabel 2.5
IKU BPBD Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029

NO	SASARAN STRATEGIS	IKU / INDIKATOR KINERJA	SATUAN
1	Meningkatnya kualitas pelayanan penanggulangan bencana	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks
2	Meningkatnya pelayanan pencegahan dan penanggulangan kebakaran	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Menit
3	Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	Angka

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tangerang memiliki Indikator Kinerja Kunci dalam Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat dengan *outcome* dan *output* sebagai berikut.

Tabel 2.6
Indikator Kinerja Kunci BPBD Kabupaten Tangerang

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	Definisi Operasional	Capaian		Target		
					2024	2025*	2024	2025	2026
1.e.3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana dibagi Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana sesuai target yang ditetapkan dikali 100%	100	100	100	100	100
1.e.4	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dibagi Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana dikali 100%	74	75	100	100	100

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	Definisi Operasional	Capaian		Target		
					2024	2025*	2024	2025	2026
1.e.5	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana dibagi Jumlah warga negara yang menjadi korban bencana dikali 100%	100	100	100	100	100

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	Definisi Operasional	Capaian		Target		
					2024	2025*	2024	2025	2026
1.e.6	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten/kota dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah ditambah jumlah layanan pemadaman di kabupaten/kota dalam tingk dibagi Jumlah kejadian kebakaran di kabupaten/kota dikali 100%	100	100	100	100	100
1.e.7	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Rata-rata waktu tanggap, dihitung dari pelaporan, penyiapan tim dan peralatan, jarak tempuh dan kesiapan pemadaman kebakaran	14,67	14	14	14	14

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Identifikasi berbagai permasalahan pembangunan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah merupakan bagian terpenting dalam perumusan isu strategis. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tangerang adalah salah satu perangkat daerah yang memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat yaitu pelayanan terkait sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran. Berikut ini adalah pemetaan permasalahan pelayanan BPBD Kabupaten Tangerang:

Tabel 2.7
Pemetaan Permasalahan Pelayanan BPBD

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Masih rendahnya mutu pelayanan dasar sub urusan kebencanaan	a. Masih rendahnya implementasi prosedur operasional penanggulangan bencana;	- Belum optimalnya fungsi koordinasi penanggulangan bencana dengan para pihak terkait
		b. Masih terbatasnya sarana prasarana penanggulangan bencana	- Rendahnya pemeliharaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana
		c. Masih rendahnya kapasitas personil/sumber daya manusia dalam kebencanaan	- Terbatasnya alokasi anggaran kegiatan Diklat Kebencanaan bagi aparatur - Belum terbangunannya kerjasama pengembangan kaspasitas personil dengan lembaga diklat terkait kebencanaan
		d. Masih rendahnya pelayanan kebencanaan bagi Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana	- Terbatasnya data warga negara dikawasan rawan bencana - Belum adanya pemetaaan daerah rawan bencana - Terbatasnya ketersediaan logistic bagi korban bencana - Masih rendahnya kinerja mitigasi structural di lokasi rawan bencana - Belum terbangunnya sistem informasi rawan bencana

2	Masih rendahnya mutu pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.	a. Masih rendahnya realisasi respon cepat (*Response Time*) penanggulangan kejadian kebakaran .	- Masih terbatasnya jumlah pos damkar dan belum optimalnya penempatan pos damkar yang ada - Belum optimalnya pemberdayaan Relawan Pemadam Kebakaran - Belum adanya Dokumen RISPK - Belum adanya pemetaan daerah rawan kebakaran
		b. Masih rendahnya layanan pelaksanaan pemadaman dan pengendalian kebakaran;	- terbatasnya sarana prasarana pemadam kebakaran yang dimiliki - terbatasnya peran serta dunia usaha dan masyarakat dalam pengendalian kebakaran - Belum terbangunnya kerjasama antar daerah dan dengan pihak ke tiga dalam pemadaman dan pengendalian kebakaran
		c. Masih rendahnya layanan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi;	Terbatasnya kapasitas petugas dalam penyelamatan dan evakuasi
		d. belum optimalnya layanan pemberdayaan masyarakat/relawan kebakaran;	- Belum terbantuknya Relawan Pemadam Kebakaran (REDKAR) di tingkat desa/kelurahan - Belum tersedianya alokasi anggaran biaya operasional bagi Relawan pemadam kebakaran
		e. masih rendahnya layanan pendataan, inspeksi dan investigasi pasca kebakaran	- Terbatasnya jumlah petugas yang memiliki sertifikasi inspektur dan investigator - terbatasnya kualitas dan kuantitas data kebakaran

Berdasarkan penjabaran permasalahan di atas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tangerang dituntut untuk lebih responsif, inovatif dan kreatif dalam menghadapi perubahan dan kejadian bencana dan kebakaran yang dapat terjadi di wilayah Kabupaten

Tangerang. Berikut ini adalah isu strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tangerang :

Tabel 2.8
Isu Strategis BPBD

No.	Permasalahan/Potensi	Isu Strategis
1	Luas wilayah kabupaten Tangerang yang sangat luas terbagi kedalam 29 kecamatan dan 274 desa/kelurahan	terbatasnya Cakupan pelayanan kebencanaan dan kebakaran yang dapat diberikan oleh 12 pos damkar
2	Tingkat kepadatan penduduk yang tinggi mencapai 3.432,16 jiwa/km2	Tingginya tingkat risiko bahaya kebakaran dan tingkat risiko bencana
		rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan kebencanaan dan kebakaran
3	Merupakan daerah penyangga ibu kota yang berfungsi sebagai daerah perdagangan, permukiman, industri dan jasa sehingga berdampak pada pesatnya pembangunan permukiman, hotel dan industry	masih rendahnya jaminan keselamatan bangunan gedung dari bahaya kebakaran
		belum terintegrasinya perencanaan Penanggulangan bencana kedalam Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
4	Memiliki 8 jenis potensi ancaman bencana dengan tingkat risiko dan kerentanan yang tinggi	Masih rendahnya kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana
5	Dilintasi oleh 5 aliran sungai besar beserta anak sungai	tingginya tingkat kerugian masyarakat akibat banjir yang disebabkan oleh luapan aliran sungai
6	berbatasan langsung dengan laut pantai utara sepanjang 52 km	tingginya tingkat abrasi pantai yang diakibatkan oleh gelombang ekstrim disepanjang pantai utara

Berikut ini adalah capaian kinerja pelayanan BPBD Kabupaten Tangerang :

Tabel 2.9
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tangerang

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	Indeks Risiko Bencana			141,43	125,22	130	125	141,43	125,22	130	125	
2	Indeks Ketahanan Daerah			0,69	0,74	0,74	0,76	0,69	0,74	0,74	0,76	
3	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran			14,33	14,67	14,67	14,65	14,33	14,67	14,67	14,65	

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Penyusunan Rancangan Awal RKPD merupakan bagian dari tahapan penyusunan dokumen RKP mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dan pelaksanaan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di tahun berkenaan, sehingga Arah Kebijakan rencana pembangunan jangka menengah di tahun berkenaan menjadi dasar penentuan tema pembangunan RKPD yang selanjutnya diselaraskan dengan tema Rencana Kerja Pemerintah di tahun berkenaan.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) memuat tema pembangunan yang dijabarkan ke dalam sasaran dan prioritas pembangunan. Pemerintah Kabupaten Tangerang berperan dalam menciptakan kestabilan, keamanan dan kebijakan pembangunan Daerah. Tujuh Prioritas RPJMN yang harus diperhatikan dalam penyusunan RKPD adalah; pertama adalah memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas. Kedua, mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. Ketiga adalah meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing, serta keempat yaitu revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. Kelima adalah memperkuat infrastruktur yang mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. Keenam, membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim, dan Ketujuh memperkuat stabilitas politik, hukum, ketahanan dan keamanan (Polhukhankam) dan transformasi pelayanan publik.

Rancangan Awal RKPD Kabupaten Tangerang tahun 2025 menjadi acuan dalam penyusunan rancangan rencana kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tangerang tahun 2025. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tangerang. Berikut ini adalah review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2025

Tabel 2.10
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tangerang

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
								NASIONAL	DAERAH	
		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			41.364.187.058,00					
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			41.364.187.058,00					
	1,05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			41.364.187.058,00					
1	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	*Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan*	100 persen	31.771.926.608,00					
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah*	6 Dokumen	100.277.000,00			-	-	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	61.285.000,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								

			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	38.992.000,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Masyarakat Bermoral Pancasila dan Demokratis Berlandaskan Iman dan Takwa Melalui Reformasi Birokrasi Yang Berintegritas, Adaptif, dan Tangguh Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Laporan Keuangan, Gaji dan Tunjangan ASN*	2 Laporan	21.794.107.058,00			-	-	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	90 Orang/bulan	21.764.187.058,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD								
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana	1 Laporan	29.920.000,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

	1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*laporan kegiatan Perencanaan kebutuhan barang milik daerah pada Perangkat Daerah*	1 Laporan	8.960.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhan k am Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudk a n Masyarak at Bermoral Pancasila dan Demokrati s Berlandas k an Iman dan Takwa Melalui Reformasi Birokrasi Yang Berint egritas, Adaptif, dan Tangguh Meningkat k an Penyele nggaraan	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
	1.05.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD								
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	8.960.000,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhan k am Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudk a n Masyarak at Bermoral Pancasila dan Demokrati s Berlandas k an Iman dan Takwa Melalui Reformasi Birokrasi Yang Berint egritas, Adaptif, dan Tangguh Meningkat k an Penyele nggaraan	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Laporan Kegiatan Administrasi kepegawaian Perangkat*	1 Laporan	201.000.000,00			-	-	Administrasi Kepegawaian Perangkat
	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya								
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	201.000.000,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Laporan kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	7 Laporan	919.372.100,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Masyarakat Bermoral Pancasila dan Demokrati s Berlandas kan Iman dan Takwa Melalui Reformasi Birokrasi Yang Berintegritas, Adaptif, dan Tangguh Meningkatkan Penyelenggaraan	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								

			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	43.958.000,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukham Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Masyarakat Bermoral Pancasila dan Demokratis Berlandaskan Iman dan Takwa Melalui Reformasi Birokrasi Yang Berintegritas, Adaptif, dan Tangguh Meningkatkan Penyelenggaraan	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	278.038.000,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	40.610.000,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	89.556.100,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	64.750.000,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Administrasi Umum Perangkat Daerah

	1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu								
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	85.200.000,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	317.260.000,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*laporan Kegiatan Pengadaan barang Milik Daerah*	2 Laporan	142.420.000,00			-	-	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang
	1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel								
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	100 Unit	93.200.000,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang
	1.05.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	49.220.000,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudk a n Masyarak at Bermoral Pancasila dan Demokrati s Berlandas k an Iman dan Takwa Melalui Reformasi Birokrasi Yang Berint egritas, Adaptif, dan Tangguh Meningkat k an Penyele nggaraan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*laporan kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	3 Laporan	6.618.804.000,00			-	-	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan
	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	30.000.000,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	539.502.000,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukham Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Masyarakat Bermoral Pancasila dan Demokratis Berlandaskan Iman dan Takwa Melalui Reformasi Birokrasi Yang Berintegritas, Adaptif, dan Tangguh Meningkatkan Penyelenggaraan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	6.049.302.000,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukham Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Secara Holistik dan Resiliensi Terhadap Bencana Meningkatkan Penyelenggaraan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah*	4 Laporan	1.986.986.450,00			-	-	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan
	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	15 Unit	205.897.200,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								

			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	50 Unit	1.430.388.300,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukham Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Masyarakat Bermoral Pancasila dan Demokratis Berlandaskan Iman dan Takwa Melalui Reformasi Birokrasi Yang Berintegritas, Adaptif, dan Tangguh Meningkatkan Penyelenggaraan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	85 Unit	150.300.000,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan
	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								

			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	200.400.950,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukham Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Masyarakat Bermoral Pancasila dan Demokratis Berlandaskan Iman dan Takwa Melalui Reformasi Birokrasi Yang Berintegritas, Adaptif, dan Tangguh Meningkatkan Penyelenggaraan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	*Indeks ketangguhan Desa (IKD)* *Persentase Korban Bencana yang Mendapat Layanan Penyelamatan*	91 Desa/Kelurahan 100 Persen	2.021.754.750,00					
	1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	*laporan pelayanan informasi rawan bencana*	1 Laporan	218.868.300,00			-	-	Pelayanan Informasi Rawan Bencana
	1.05.03.2.01.0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)								
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu)	91 Orang	119.038.800,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pelayanan Informasi Rawan Bencana
	1.05.03.2.01.0008	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota								

			Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam	1 Dokumen	99.829.500,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pelayanan Informasi Rawan Bencana
	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	*Laporan Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap Bencana*	6 Laporan	691.970.650,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Secara Holistik dan Resiliensi Terhadap Bencana Meningkatkan Pemban	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
	1.05.03.2.02.0013	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota								
			Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani	1 Kegiatan	40.000.000,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Secara Holistik dan Resiliensi Terhadap Bencana Meningkatkan Pemban	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
	1.05.03.2.02.0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota								
			Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat	50 Unit	240.750.000,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
	1.05.03.2.02.0018	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota								

			Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota	400 Orang	92.788.000,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
	1.05.03.2.02.0021	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota								
			Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk	100 Orang	53.375.500,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
	1.05.03.2.02.0022	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota								
			Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	67.675.950,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Secara Holistik dan Resiliensi Terhadap Bencana Meningkatkan Penyelenggaraan	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
	1.05.03.2.02.0026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota								

			Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	1 laporan	18.704.000,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Secara Holistik dan Resiliensi Terhadap Bencana Meningkatkan Pemban	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
	1.05.03.2.02.0027	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota								
			Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama	1 Dokumen	131.329.500,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
	1.05.03.2.02.0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota								
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	200 Kawasan	47.347.700,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Secara Holistik dan Resiliensi Terhadap Bencana Meningkatkan Pemban	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

	1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	*Laporan Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana*	2 Laporan	856.550.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Secara Holistik dan Resiliensi Terhadap Bencana Meningkatkan Pemban	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
	1.05.03.2.03.0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota								
			Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	1 Dokumen	14.300.000,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Secara Holistik dan Resiliensi Terhadap Bencana Meningkatkan Pemban	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
	1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota								
			Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	100 Orang	54.000.000,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Secara Holistik dan Resiliensi Terhadap Bencana Meningkatkan Pemban	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
	1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota								

			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	25000 Orang	788.250.000,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Secara Holistik dan Resiliensi Terhadap Bencana Meningkatkan Pemban	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
								NASIONAL	DAERAH	
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14
	1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	*Laporan penataan Sistem dasar Penanggulangan Bencana*	4 Laporan	254.365.800,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Secara Holistik dan Resiliensi Terhadap Bencana Meningkatkan Pemban	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
	1.05.03.2.04.0001	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota								

			Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	1 Dokumen	21.654.500,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Secara Holistik dan Resiliensi Terhadap Bencana Meningkatkan Pemban	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
	1.05.03.2.04.0003	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota								
			Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	1 Dokumen	87.684.500,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Secara Holistik dan Resiliensi Terhadap Bencana Meningkatkan Pemban	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
	1.05.03.2.04.0004	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan								
			Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	1 Dokumen	29.970.000,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
	1.05.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota								
			Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang	1 Kegiatan	16.892.300,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
	1.05.03.2.04.0014	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota								

			Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama	1 Dokumen	98.164.500,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
3	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	*Jumlah Masyarakat yang mendapat layanan pencegahan dan penanggulangan kebakaran Persentase Korban Kebakaran dan non kebakaran yang mendapat Layanan Penyelamatan dan*	1500 Orang 100 persen	7.570.505.700,00					
	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Laporan Pelayanan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota*	7 Laporan	7.261.671.600,00			-	-	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah
	1.05.04.2.01.0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota								
			Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	1 Dokumen	113.082.400,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah
	1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota								

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
								NASIONAL	DAERAH	
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14

			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	35.220.000,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Secara Holistik dan Resiliensi Terhadap Bencana Meningkatkan Pemban	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
	1.05.04.2.01.0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran								
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	1 Dokumen	924.098.000,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Secara Holistik dan Resiliensi Terhadap Bencana Meningkatkan Pemban	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
	1.05.04.2.01.0004	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota								
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	69.953.200,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah
	1.05.04.2.01.0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran								

			Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	100 Orang	348.728.000,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah
	1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri								
			Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	50 Unit	5.750.450.000,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah
	1.05.04.2.01.0018	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran								
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	1 Dokumen	20.140.000,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berintegritas, Berdaya Saing, Berkualitas, Inovatif, dan Tidak Diskriminatif Meningkatkan Penyelenggaraan Tata	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
	1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	*data/dokumen Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran*	2 Dokumen	67.480.900,00			-	-	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran
	1.05.04.2.02.0001	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran								

			Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi	1 Dokumen	31.837.800,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran
	1.05.04.2.02.0002	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran								
			Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	1 Dokumen	35.643.100,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Secara Holistik dan Resiliensi Terhadap Bencana Meningkatkan Pemban	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran
	1.05.04.2.03	Investigasi Kejadian Kebakaran	*data/dokumen Investigasi Kejadaian Kebakaran*	1 Dokumen	23.460.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Secara Holistik dan Resiliensi Terhadap Bencana Meningkatkan Pemban	Investigasi Kejadian Kebakaran
	1.05.04.2.03.0001	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran								

			Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian	1 Dokumen	23.460.000,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Secara Holistik dan Resiliensi Terhadap Bencana Meningkatkan Pemban	Investigasi Kejadian Kebakaran
	1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	*laporan Kegiatan Pemberdayaan dalam Pencegahan Kebakaran*	3 Laporan	168.194.000,00			-	-	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan
	1.05.04.2.04.0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat								
			Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap	200 Orang	78.840.000,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran
	1.05.04.2.04.0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran								
			Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	92 Desa/Kelurahan	69.374.000,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Secara Holistik dan Resiliensi Terhadap Bencana Meningkatkan Pemban	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran

			Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/ Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar	1 Dokumen	19.980.000,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Secara Holistik dan Resiliensi Terhadap Bencana Meningkatkan Pemban	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran
	1.05.04.2.05	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	*Laporan hasil penyelenggaraan Operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia*	1 Laporan	49.699.200,00			-	-	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi
	1.05.04.2.05.0004	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi								
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal	1 Laporan	49.699.200,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia
	JUMLAH				41.364.187.058,					

2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan kegiatan yang dimiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah berkaitan dengan penanganan bencana dan kebakaran yang pelayanannya sangat penting bagi masyarakat. Program dan Kegiatan Tahun 2024 yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan pelayanan maupun *stake holder* lainnya telah diusulkan melalui forum perangkat daerah yang telah dilaksanakan pada bulan Maret 2024 di Hotel Lemo Tangerang. Berikut ini usulan program dan kegiatan yang disampaikan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tangerang :

Tabel 2.11
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	Program Penanggulangan Bencana	Kabupaten Tangerang	1. Indeks Ketangguhan Desa (IKD) : 1.1 Desa Kelurahan tangguh bencana madya		- Penanganan Banjir di beberapa titik lokasi yang sering banjir - Pendistribusian logistik bantuan yang terkena bencana
			1.2 Desa Kelurahan tangguh bencana utama		
			2. Persentase Jumlah Penduduk di Kawasan Rawan Bencana yang Memperoleh Informasi Rawan Bencana seuai Jenis Ancaman Bencana		
			3. Persentase Korban Bencana yang Mendapat Layanan Penyelamatan dan Evakuasi		
2	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Kabupaten Tangerang	Persentase Korban Kebakaran dan non kebakaran yang mendapat Layanan Penyelamatan dan Evakuasi		sarana prasarana untuk relawan pemadam kebakaran di setiap kecamatan
			Jumlah masyarakat yang mendapat layanan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran		

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERUBAHAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2025

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu yang dilaksanakan guna mencapai sasaran tertentu. Sedangkan kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Bab ini berisi rencana program, kegiatan dan sub kegiatan, lokasi kegiatan, indicator kinerja, kelompok sasaran dan prakiraan maju yang ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang menjadi tanggung jawab untuk diwujudkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tangerang sesuai dengan Rencana Strategis Tahun 2025 - 2029. BPBD Kabupaten Tangerang merupakan SKPD dalam urusan pemerintahan bidang ketentraman umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran. Oleh karena itu, BPBD Kabupaten Tangerang memiliki 3 Program, yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penanggulangan Bencana
3. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota

Program dan kegiatan serta pendanaan indikatif yang akan dilaksanakan pada periode triwulan akhir tahun berjalan 2025 sebagaimana terlampir dalam Tabel berikut :

Tabel 3.1
Rencana Kerja dan Pendanaan Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				**41.364.187.058**	**43.871.119.801**	**44.215.919.916**	**- 2.851.732.858**				
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**41.364.187.058**	**43.871.119.801**	**44.215.919.916**	**- 2.851.732.858**				
	1,05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**				**41.364.187.058**	**43.871.119.801**	**44.215.919.916**	**- 2.851.732.858**				
1	**1.04.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan**	**100 persen**	**100 persen**	**31.791.096.308**	**34.774.000.451**	**34.234.361.366**	**- 2.443.265.058**				

	1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah*	6 Dokumen	6 Dokumen	100.277.000	195.875.000	163.401.000	**- 63.124.000**			-	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
	1.04.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	61.285.000	116.007.000	103.573.000	**- 42.288.000**	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
	1.04.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											

			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan	38.992.000	79.868.000	59.828.000	**- 20.836.000**	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang BaikMeningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

	1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Laporan Keuangan, Gaji dan Tunjangan ASN*	2 Laporan	2 Laporan	21.794.107.058	24.281.146.233	22.592.982.348	**- 798.875.290**			-	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
	1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											

			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	90 Orang/bulan	90 Orang/bulan	21.764.187.058	24.267.226.233	22.583.302.348	**-819.115.290**	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
	1.04.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD											

			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	1 Laporan	1 Laporan	29.920.000,00	13.920.000,00	9.680.000,00	**20.240.000**	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
	1.04.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*laporan kegiatan Perencanaan kebutuhan barang milik daerah pada Perangkat Daerah*	1 Laporan	1 Laporan	8.960.000	8.960.000	6.800.000	**2.160.000**			-	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
	1.04.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD											

			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	8.960.000	8.960.000	6.800.000	**2.160.000**	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
	1.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Laporan Kegiatan Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah*	1 Laporan	1 Laporan	201.000.000	175.662.000	175.662.000	**25.338.000**			-	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
	1.04.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya											

NO	**KODE**	**URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN**	**INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN**	**CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN**									
				TARGET 2025		**PAGU INDIKATIF (Rp)**			**Bertambah/Berkurang (10-12)**	**LOKASI**	**SUMBER DANA**	**PRIORITAS**	
				SEBELUM	**SESUDAH**	**RKPD 2025**	**APBD 2025**	**RKPD PERUBAHAN 2025**				**NASIONAL**	**DAERAH**
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	201.000.000	175.662.000	175.662.000	**25.338.000**	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

	1.04.01.2.06	Administrasi UmumPerangkat Daerah	*Laporan kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	7 Laporan	7 Laporan	899.997.100	950.465.300	1.144.962.800	**- 244.965.700**			-	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang BaikMeningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
	1.04.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor											

			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	43.958.000	43.958.000	43.958.000	-	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
	1.04.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											

			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	258.663.000	248.754.200	603.279.200	**-344.616.200**	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
	1.04.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga											

			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	40.610.000	37.980.000	57.532.500	**- 16.922.500**	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
	1.04.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor											

			Jumlah Paket Bahan LogistikKantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	89.556.100	86.133.100	88.273.100	**1.283.000**	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang BaikMeningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
	1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan											

			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	64.750.000	50.260.000	50.175.000	**14.575.000**	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
	1.04.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu											

			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	85.200.000	85.200.000	60.900.000	**24.300.000**	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
	1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											

			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	317.260.000	398.180.000	240.845.000	**76.415.000**	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

	1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*laporan Kegiatan Pengadaan barang Milik Daerah*	2 Laporan	2 Laporan	142.420.000	152.307.000	348.612.000	**- 206.192.000**			-	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
	1.04.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel											

			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	100 Unit	100 Unit	93.200.000	80.028.000	130.636.500	**- 37.436.500**	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

NO	**KODE**	**URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN**	**INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN**	**CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN**									
				TARGET 2025		**PAGU INDIKATIF (Rp)**			**Bertambah/Berkurang (10-12)**	**LOKASI**	**SUMBER DANA**	**PRIORITAS**	
				SEBELUM	**SESUDAH**	**RKPD 2025**	**APBD 2025**	**RKPD PERUBAHAN 2025**				**NASIONAL**	**DAERAH**
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.04.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											

			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	10 Unit	49.220.000	72.279.000	217.975.500	**-168.755.500**	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang BaikMeningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

	1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*laporan kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	3 Laporan	3 Laporan	6.618.804.000	6.828.526.340	7.264.726.340	**- 645.922.340**			-	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
	1.04.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat											

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	30.000.000	48.060.000	48.060.000	**- 18.060.000**	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
	1.04.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	539.502.000	585.270.772	585.270.772	**- 45.768.772**	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
	1.04.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	6.049.302.000	6.195.195.568	6.313.395.568	**- 264.093.568**	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

	1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah*	4 Laporan	4 Laporan	2.025.531.150	2.181.058.578	2.537.214.878	**- 511.683.728**			-	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
	1.04.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											

			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15 Unit	15 Unit	205.897.200	188.009.964	188.009.964	**17.887.236**	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang BaikMeningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
	1.04.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											

			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	50 Unit	50 Unit	1.430.388.300	1.526.454.156	1.525.454.156	**- 95.065.856**	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
	1.04.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya											

			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	85 Unit	85 Unit	150.300.000	159.330.000	159.330.000	**- 9.030.000**	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
	1.04.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											

			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	5 Unit	238.945.650	307.264.458	664.420.758	**-425.475.108**	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
2	**1.05.03**	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**Persentase Korban Bencana yang Mendapat Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Indeks ketangguhan Desa (IKD)**	**100 91 Persen Desa/Kelur ahan**	**100 91 Persen Desa/Kelurahan**	**2.002.585.050**	**1.634.119.050**	**1.606.167.550**	**396.417.500**				

NO	**KODE**	**URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN**	**INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN**	**CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN**									
				TARGET 2025		**PAGU INDIKATIF (Rp)**			**Bertambah/Berkurang (10-12)**	**LOKASI**	**SUMBER DANA**	**PRIORITAS**	
				SEBELUM	**SESUDAH**	**RKPD 2025**	**APBD 2025**	**RKPD PERUBAHAN 2025**				**NASIONAL**	**DAERAH**

1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	*laporan pelayanan informasi rawan bencana*	1 Laporan	1 Laporan	216.052.600	199.206.000	162.603.800	**53.448.800**			-	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan
	1.05.03.2.01.0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)											

			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenisancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	91 Orang	91 Orang	118.223.100	101.376.500	94.689.500	**23.533.600**	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan
	1.05.03.2.01.0008	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota											

			Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	1 Dokumen	97.829.500	97.829.500	94.689.500	**3.140.000**	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan

	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	*Laporan Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap Bencana*	6 Laporan	6 Laporan	691.216.650	601.171.850	576.118.850	**115.097.800**			-	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan
	1.05.03.2.02.0013	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota											

			Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani	1 Kegiatan	1 Kegiatan	27.626.000	26.868.500	23.838.500	**3.787.500**	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan
	1.05.03.2.02.0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota											

			Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	50 Unit	50 Unit	254.125.000	105.362.400	105.362.400	**148.762.600**	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan
	1.05.03.2.02.0018	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota											

			Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota	400 Orang	400 Orang	92.788.000	99.255.000	83.075.000	**9.713.000**	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
	1.05.03.2.02.0021	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota											

			Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	100 Orang	100 Orang	51.450.500	52.854.700	51.454.700	**- 4.200**	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan
	1.05.03.2.02.0022	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota											

			Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	1 Dokumen	67.845.950	67.835.000	66.761.000	**1.084.950**	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
	1.05.03.2.02.0026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota											

			Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	1 laporan	1 laporan	18.704.000	79.760.000	79.760.000	**- 61.056.000**	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan
	1.05.03.2.02.0027	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota											

			Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	1 Dokumen	131.329.500	129.222.500	127.253.500	**4.076.000**	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan

NO	**KODE**	**URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN**	**INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN**	**CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN**									
				TARGET 2025		**PAGU INDIKATIF (Rp)**			**Bertambah/Berkurang (10-12)**	**LOKASI**	**SUMBER DANA**	**PRIORITAS**	
				SEBELUM	**SESUDAH**	**RKPD 2025**	**APBD 2025**	**RKPD PERUBAHAN 2025**				**NASIONAL**	**DAERAH**
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.03.2.02.0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota											

			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	200 Kawasan	200 Kawasan	47.347.700	40.013.750	38.613.750	**8.733.950**	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan

	1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	*Laporan Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana*	2 Laporan	2 Laporan	840.950.000	631.350.000	691.628.000	**149.322.000**			-	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan
	1.05.03.2.03.0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota											

			Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	1 Dokumen	1 Dokumen	14.300.000	14.380.000	9.708.000	**4.592.000**	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan
	1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota											

			Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	100 Orang	100 Orang	54.000.000	32.400.000	32.400.000	**21.600.000**	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan
	1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota											

			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	25000 Orang	65000 Orang	772.650.000	584.570.000	649.520.000	**123.130.000**	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan

	1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	*Laporan penataan Sistem dasar Penanggulangan Bencana*	4 Laporan	4 Laporan	254.365.800	202.391.200	175.816.900	**78.548.900**			-	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan
	1.05.03.2.04.0001	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota											

			Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana diDaerah	1 Dokumen	1 Dokumen	21.654.500	14.537.500	13.077.500	**8.577.000**	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan
	1.05.03.2.04.0003	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota											

			Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	1 Dokumen	1 Dokumen	87.684.500	75.424.300	55.019.500	**32.665.000**	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan
	1.05.03.2.04.0004	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan											

			Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	1 Dokumen	1 Dokumen	29.970.000	27.414.000	24.804.500	**5.165.500**	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan
	1.05.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota											

			Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	16.892.300	16.427.900	16.427.900	**464.400**	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan
	1.05.03.2.04.0014	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota											

			Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	1 Dokumen	98.164.500	68.587.500	66.487.500	**31.677.000**	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan

NO	**KODE**	**URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN**	**INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN**	**CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN**									
				TARGET 2025		**PAGU INDIKATIF (Rp)**			**Bertambah/Berkurang (10-12)**	**LOKASI**	**SUMBER DANA**	**PRIORITAS**	
				SEBELUM	**SESUDAH**	**RKPD 2025**	**APBD 2025**	**RKPD PERUBAHAN 2025**				**NASIONAL**	**DAERAH**
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

3	**1.05.04**	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	**Persentase Korban Kebakaran dan non kebakaran yang mendapat Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Jumlah Masyarakat yang mendapat layanan pencegahan dan penanggulangan kebakaran**	**1500 100 Orang persen**	**100 1500 persen Orang**	**7.570.505.700**	**7.463.000.300**	**8.375.391.000**	**- 804.885.300**				

	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Laporan Pelayanan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota*	7 Laporan	7 Laporan	7.261.671.600	7.211.337.000	8.202.093.000	**- 940.421.400**			-	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan
	1.05.04.2.01.0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota											

			Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	1 Dokumen	1 Dokumen	113.082.400	25.255.000	22.152.000	**90.930.400**	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan
	1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota											

			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	35.220.000	45.398.000	16.868.000	**18.352.000**	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan
	1.05.04.2.01.0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran											

			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	1 Dokumen	1 Dokumen	924.098.000	919.018.000	919.018.000	**5.080.000**	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan
	1.05.04.2.01.0004	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota											

			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	69.953.200	182.385.000	182.385.000	**- 112.431.800**	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan
	1.05.04.2.01.0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran											

			Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	100 Orang	100 Orang	348.728.000	253.478.000	293.497.000	**55.231.000**	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan
	1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri											

			Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	50 Unit	50 Unit	5.750.450.000	5.765.790.000	6.764.379.000	**- 1.013.929.000**	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan
	1.05.04.2.01.0018	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran											

			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	1 Dokumen	1 Dokumen	20.140.000	20.013.000	3.794.000	**16.346.000**	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

	1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	*data/ dokumen Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran*	2 Dokumen	2 Dokumen	67.480.900	60.198.500	26.172.500	**41.308.400**			-	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan
	1.05.04.2.02.0001	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran											

			Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	1 Dokumen	1 Dokumen	31.837.800	31.659.000	18.840.000	**12.997.800**	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan
	1.05.04.2.02.0002	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran											

NO	**KODE**	**URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN**	**INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN**	**CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN**									
				TARGET 2025		**PAGU INDIKATIF (Rp)**			**Bertambah/Berkurang (10-12)**	**LOKASI**	**SUMBER DANA**	**PRIORITAS**	
				SEBELUM	**SESUDAH**	**RKPD 2025**	**APBD 2025**	**RKPD PERUBAHAN 2025**				**NASIONAL**	**DAERAH**
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

			Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	1 Dokumen	1 Dokumen	35.643.100	28.539.500	7.332.500	**28.310.600**	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan

	1.05.04.2.03	Investigasi Kejadian Kebakaran	*data/ dokumen Investigasi Kejadaian Kebakaran*	1 Dokumen	1 Dokumen	23.460.000	23.460.000	14.670.000	**8.790.000**			-	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan
	1.05.04.2.03.0001	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran											

			Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian	1 Dokumen	1 Dokumen	23.460.000	23.460.000	14.670.000	**8.790.000**	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan

	1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	*laporan Kegiatan Pemberdayaan dalam Pencegahan Kebakaran*	3 Laporan	3 Laporan	168.194.000	118.860.000	104.424.000	**63.770.000**			-	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan
	1.05.04.2.04.0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat											

			Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	200 Orang	200 Orang	78.840.000	28.996.000	19.179.000	**59.661.000**	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan
	1.05.04.2.04.0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran											

			Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	92 Desa/Kelurahan	92 Desa/Kelurahan	69.374.000	76.384.000	71.765.000	**-2.391.000**	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan
	1.05.04.2.04.0003	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana											

			Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar	1 Dokumen	1 Dokumen	19.980.000	13.480.000	13.480.000	**6.500.000**	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan

	1.05.04.2.05	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	*Laporan hasil penyelenggaraan Operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia*	1 Laporan	1 Laporan	49.699.200	49.144.800	28.031.500	**21.667.700**			-	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan
	1.05.04.2.05.0004	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi											

			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal	1 Laporan	1 Laporan	49.699.200	49.144.800	28.031.500	**21.667.700**	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan
	J U M L A H							**41.364.187.058**	**43.871.119.801**		**44.215.919.916**	**- 2.851.732.858**	

BAB IV
PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025 disusun dengan berdasarkan kepada evaluasi tingkat efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun berjalan sehingga diharapkan dapat secara sinergis dan komprehensif mampu memberikan solusi terhadap permasalahan-permasalahan dan kebutuhan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tangerang pada periode triwulan akhir tahun 2025. Renja Perubahan Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan untuk periode pada triwulan akhir tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, yang dilaksanakan oleh perangkat daerah.

Tindak lanjut dari dokumen ini adalah dengan merencanakan dokumen teknis operasional kegiatannya dalam bentuk Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perubahan dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan sehingga program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan atas hasil evaluasi pada tahun berjalan, dapat diimplementasikan secara optimal oleh setiap bidang yang ada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tangerang.

Pada sisi lainnya, hal yang sangat penting dalam kesinambungan program dan kegiatan adalah dengan melaksanakan pengendalian secara simultan oleh penanggung jawab program dan kegiatan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi sebagai bagian atau proses didalam pelaksanaan sebuah program dan kegiatan. Dengan adanya monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan dengan baik, diharapkan program-program dan kegiatan-kegiatan yang tertuang di dalam rencana kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tangerang ini, dapat membantu Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025-2029. Dengan demikian pemerintah daerah Kabupaten Tangerang melalui perangkat daerah dapat melaksanakan pembangunan dengan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

13. Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja Perangkat Daerah) untuk penyesuaian perencanaan tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP), serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah disusun dalam Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Perubahan RKPD).

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Proses penyusunan Renja perubahan perangkat daerah dimulai dengan persiapan penyusunan Renja perangkat daerah dengan mengumpulkan bahan pengolahan data dan informasi serta menganalisa gambaran pelayanan perangkat daerah untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi renja perangkat daerah
tahun lalu sesuai Renstra perangkat daerah yang didasarkan pada penelaahan rancangan awal perangkat daerah yang selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan pada penelaahan usulan kegiatan masyarakat.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman Kabupaten Tangerang Tahun 2025, memuat Pagu Anggaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, Lokasi dan kelompok Sasaran yang disertai indikator kinerja dan dan pendanaan sesuai dengan kebutuhan. Perubahan Rencana Kerja didasarkan pada hasil percepatan dan penyesuaian Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, berdasarkan evaluasi Renja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman Kabupaten Tangerang sampai Triwulan II Tahun Anggaran 2025.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman Kabupaten Tangerang Tahun 2025 disusun sebagai bahan acuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman Kabupaten Tangerang Tahun 2025, dengan memperhatikan dimensi waktu serta permasalahan-permasalahan yang berkembang pada masa yang akan datang sehingga dapat memberikan dampak yang optimal dalam pencapaian tujuan dan

sasaran perangkat daerah.

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel, diperlukan sistem perencanaan pembangunan yang terintegrasi dan berkesinambungan. Perencanaan pembangunan daerah disusun secara sistematis melalui dokumen perencanaan yang saling berkaitan, antara lain Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD). Ketiga dokumen tersebut memiliki peran dan fungsi yang saling mendukung dalam siklus perencanaan pembangunan tahunan dan jangka menengah.

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan dokumen perencanaan jangka menengah (5 tahunan) yang menjadi acuan bagi perangkat daerah dalam menetapkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Sementara itu, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan yang memuat prioritas pembangunan dan kerangka ekonomi makro yang digunakan sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). RKPD disusun oleh Bappeda dengan mengacu pada RPJMD dan memuat masukan dari Renja seluruh perangkat daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) adalah dokumen perencanaan tahunan yang disusun oleh masing-masing perangkat daerah, sebagai penjabaran dari Renstra PD dan sebagai masukan penyusunan RKPD. Dengan demikian, Renja merupakan titik temu antara perencanaan strategis perangkat daerah dengan perencanaan tahunan tingkat kabupaten/kota.

Hubungan ketiga dokumen ini bersifat hierarkis dan integratif. Renja disusun dengan mengacu pada arah kebijakan Renstra PD serta menyesuaikan dengan arah pembangunan tahunan daerah dalam RKPD. Sinergi antara ketiganya penting untuk menjamin konsistensi antara perencanaan jangka menengah dengan pelaksanaan pembangunan tahunan, sehingga tujuan pembangunan daerah dapat tercapai secara terukur, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

Oleh karena itu, penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman Kabupaten Tangerang dalam satu tahun anggaran, yang mendukung pencapaian sasaran strategis Renstra 2025–2030 serta sejalan dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah dalam RKPD Tahun 2025.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukun penyusunan Renja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman Kabupaten Tangerang Tahun 2025, adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10).
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan. Daerah, Tata cara Evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).
10. Keputusan Meteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Validasi dan Invenrarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 tahun 2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 12);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembar Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0222)
14. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 39 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026(Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2023 Nomor 39);
15. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman Kabupaten Tangerang (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2023 Nomor 8);
16. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 16 Tahun 2024

Tentang RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2024 Nomor 16).

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 MAKSUD

Rencana Kerja (Renja) perubahan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman Kabupaten Tangerang Tahun 2025 ditetapkan dengan maksud sebagai berikut:

1. Sebagai dokumen perencanaan bagi Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman Kabupaten Tangerang untuk kurun waktu tahun 2025 yang mencakup program, kegiatan, Sub Kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan Perubahan RKPD;
2. Sebagai instrumen evaluasi capaian tolok ukur kinerja impact sasaran, outcome program dan output kegiatan serta sub kegiatan Renja tahun berjalan dan capaian Renstra Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.3.2 TUJUAN

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan ini adalah untuk :

1. Sebagai acuan dalam mengoperasionalkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam ranfka mencapai visi dan misi pemerintah daerah;
2. Menjadi pedoman bagi Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman dalam menyusun perubahan rencana kerja dan anggaran tahun 2025;
3. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah dalam kurun waktu tahun 2025 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman Tahun 2025 disusun dengan menggunakan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2025

2.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 s.d Triwulan II

2.2 Analisis Kinerja Perangkat Daerah

2.3 Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

2.4 Capaian Target dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 sd Triwulan II

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

3.1 Program dan Kegiatan Tahun 2025

BAB IV PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2025 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

2.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 Sampai dengan Triwulan II

Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pemakaman di Kabupaten Tangerang Tahun 2025, hasil reviu dan Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pemakaman berdasarkan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 75 Tahun 2023 tentang indikator Kinerja Utama Tahun 2024-2026 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang telah ditetapkan sebanyak 2 sasaran strategis dan sebanyak 2 Indikator Kinerja Utama (Outcomes) dengan rincian sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Permukiman Perumahan dan Pemakaman
1. Rasio Luas Kawasan Permukiman, Perumahan dan Pemakaman yang layak

Sasaran 2 : Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah
1. Nilai Akip Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pemakaman

A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA

Dalam rangka mengukur dan meningkatkan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Sebagai upaya untuk meningkatkan Akuntabiilitas Pemerintah, Kabupaten Tangerang menetapkan Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2023 tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2024-2026 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang pada tanggal 14 Juli 2023, selain itu dilakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangnat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Capaian Indikator Kinerja Utama ditentukan atas target yang akan dicapai dengan cara pengukuran atau formulasi yang telah ditetapkan. Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pemakaman Kabupaten Tangerang Tahun 2024 menunjukan hasil sebagai berikut:

Tabel 2.1
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman
Kabupaten Tangerang

NO	TUJUAN RENSTRA	INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN	Satuan	Kondisi Awal		Target 2025
				2023	2024	
1	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Permukiman Perumahan dan Pemakaman	Rasio luas Kawasan Permukiman, Perumahan dan Pemakaman yang layak	Rasio	0.9436	0.9439	0.9442
2		Persentase Sarana dan Prasarana Permukiman, Perumahan dan Pemakaman yang Berkualitas	Persen	100	100	100
3	**Meningkatkan Kinerja Perangkat Daerah**	Nilai SAKIP Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman	**Nilai**	**78**	**79.00**	**79.00**

B. Capaian Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pemakaman Sampai Dengan Triwulan II

Tabel 2.2
Capaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan Pemukiman dan Pemakaman Kabupaten Tangerang Tahun 2024

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal		Proyeksi
				2023	2024	2025 Target
1	2	3	4	6	7	8
1		Rasio luas Kawasan Permukiman, Perumahan dan Pemakaman yang layak	Rasio	0.9436	0.9439	0.9442
2		Persentase Sarana dan Prasarana	Persen	100	100	100

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal		Proyeksi
				2023	2024	2025
						Target
		Permukiman, Perumahan dan Pemakaman yang Berkualitas				
3		Nilai AKIP Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman	Nilai	78	79	80
2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Capaian Program : Cakupan Sarana Air Bersih	Persen	64.67	72.67	80.67
		Capaian Program : Prosentase Terpenuhinya Pelayanan Pendistribusian Air Bersih Bagi Masyarakat	Persen	100	100	100
3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Capaian Program : Persentase Sarana Sanitasi yang Dibangun	Persen	96.48	96.75	96.88
		Capaian Program : Persentase Cakupan Layanan Penyedotan Lumpur Tinja	Persen	0.138	0.140	0.143
4	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Capaian Program : Persentase Peningkatan kualitas permukiman tidak tertata	Persen	100	100	100
		Hasil : Persentase Sarana dan Prasarana TPU yang terbangun	Persen	14.14	14.14	14.14
		Persentase Sarana dan Prasarana TPU yang Terpelihara	Persen	11.11	12.12	14.14
5	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Capaian Program : Persentase Pemenuhan Pembinaan Pengelolaan Penyelenggaraan, pendataan dan Perencanaan Perumahan, rumah susun dan Apartemen	Persen	100	100	100
		Capaian Program : Persentase Pemenuhan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Persen	100	100	100
6	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Capaian Program : Persentase Pemenuhan Perencanaan Pengembangan Kawasan Permukiman	Persen	100	100	100
		Capaian Program : Persentase Rumah Layak Huni	Persen	5.52	8.27	11.09
7	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Capaian Program : Persentase Perumahan yang memenuhi Standar	Persen	45.14	47.89	50.64

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Proyeksi	
				2023	2024	2025
						Target
8	**PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH**	Capaian Program : Persentase Kebutuhan Lahan bagi Kepentingan Umum	Persen	100.00	30.97	35.40
9	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persen	100	100	100
		Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang, Pengadaan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persen	100	100	100

Penetapan Perubah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tangerang
Tahun 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	19	20
		DINAS PERUMAHAN, PEMUKIMAN DAN PEMAKAMAN							**399.633.224.523,00**	**359.117.406.681,00**	**357.830.925.964,00**		**448.803.557.091,00**
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**345.713.453.123,00**	**242.835.122.691,00**	**241.707.679.474,00**		**156.473.787.091,00**
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							**156.028.806.983,00**	**93.149.625.024,00**	**92.916.606.661,50**		**24.100.000.000,00**
1,	**1.03.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**Cakupan Sarana Air Bersih**				**80.67 Persen**	**80.67 Persen**	**145.265.937.611,00**	**73.520.386.020,00**	**73.368.851.020,00**		**3.800.000.000,00**

	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Pembangunan sarana air bersih bagi masyarakat*				900 Unit	833 Unit	145.265.937.611,00	73.520.386.020,00	73.368.851.020,00		3.800.000.000,00
	1.03.03.2.01.0022	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan											
			Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun				900 Unit	833 Unit	141.496.723.071,00	69.841.753.930,00	69.711.579.930,00		0,00
	1.03.03.2.01.0024	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)											

			Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)				75 Orang	75 Orang	189.182.200,00	126.610.000,00	97.207.500,00		200.000.000,00
2,	**1.03.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**Persentase Sarana Sanitasi yang Dibangun**				**96.75 Persen**	**96.75 Persen**	**10.679.849.312,00**	**19.629.239.004,00**	**19.547.755.641,50**		**16.900.000.000,00**
	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Terbangunnya Sarana Sanitasi bagi masyarakat*				561 SR	1377 SR	10.679.849.312,00	19.629.239.004,00	19.547.755.641,50		16.900.000.000,00
	1.03.05.2.01.0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat											

			Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar				561 Rumah Tangga	1377 Rumah Tangga	5.721.025.450,00	13.239.226.450,00	13.161.927.337,50		9.500.000.000,00
	1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**							**189.684.646.140,00**	**149.685.497.667,00**	**148.791.072.812,50**		**132.373.787.091,00**
1,	**1.04.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan**				**100 Persen**	**100 Persen**	**19.581.022.713,00**	**20.209.830.231,00**	**19.893.340.469,00**		**19.389.244.116,00**
	1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Tersedianya Dokumen Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah*				17 dokumen	16 dokumen	383.736.700,00	521.127.000,00	376.953.750,00		450.378.636,00
	1.04.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											

			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8 Dokumen	8 Dokumen	129.352.500,00	186.161.000,00	150.636.250,00		122.887.406,00
	1.04.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	4 Laporan	216.158.200,00	201.170.000,00	155.667.500,00		294.056.815,00
	1.04.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	38.226.000,00	133.796.000,00	70.650.000,00		33.434.415,00

	1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Tersedianya Laporan Keuangan*				4 dokumen	4 dokumen	15.121.909.013,00	15.205.352.047,00	15.438.492.285,00		15.104.520.680,00
	1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				58 Orang/bulan	57 Orang/bulan	15.031.232.213,00	15.064.224.047,00	15.304.884.285,00		15.031.232.213,00
	1.04.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD											
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				4 Laporan	4 Laporan	90.676.800,00	141.128.000,00	133.608.000,00		73.288.467,00

	1.04.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah*				12 Bulan	12 Bulan	29.811.500,00	29.895.000,00	33.440.000,00		29.800.300,00
	1.04.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD											
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	29.811.500,00	29.895.000,00	33.440.000,00		29.800.300,00
	1.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah pegawai yang difasilitasi*				119 orang	301 orang	350.267.600,00	378.812.000,00	316.319.000,00		250.000.000,00
	1.04.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya											

			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	100.000.000,00	95.040.000,00	95.040.000,00		0,00
	1.04.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi											
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				119 Orang	121 Orang	250.267.600,00	283.772.000,00	221.279.000,00		250.000.000,00
	1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah*				-	7 Jenis	1.971.290.900,00	2.178.635.900,00	1.829.727.150,00		2.071.650.000,00
	1.04.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											

			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	4 Paket	22.945.500,00	22.945.500,00	22.945.500,00		24.150.000,00
	1.04.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Paket	11 Paket	599.308.000,00	755.023.400,00	755.023.400,00		630.000.000,00
	1.04.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga											
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				14 Paket	2 Paket	35.408.000,00	31.051.400,00	31.051.400,00		36.750.000,00
	1.04.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor											

			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				23 Paket	11 Paket	299.648.500,00	336.448.400,00	336.448.400,00		315.000.000,00
	1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan											
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				6 Paket	3 Paket	313.845.900,00	329.032.200,00	268.940.950,00		330.750.000,00
	1.04.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu											
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				2 Laporan	2 Laporan	150.200.000,00	150.200.000,00	118.650.000,00		157.500.000,00
	1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											

			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	549.935.000,00	553.935.000,00	296.667.500,00		577.500.000,00
	1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				1 Jenis	1 Jenis	200.017.000,00	203.591.400,00	203.591.400,00		210.000.000,00
	1.04.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel											
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 Unit	55 Unit	200.017.000,00	203.591.400,00	203.591.400,00		210.000.000,00
	1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				-	3 Jenis	129.587.000,00	300.542.000,00	302.942.000,00		134.562.000,00
	1.04.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat											

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	15.162.000,00	15.162.000,00	17.562.000,00		15.162.000,00
	1.04.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	14.400.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00		14.400.000,00
	1.04.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	100.025.000,00	279.380.000,00	279.380.000,00		105.000.000,00

	1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				3 Jenis	3 Jenis	1.394.403.000,00	1.391.874.884,00	1.391.874.884,00		1.138.332.500,00
	1.04.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				35 Unit	78 Unit	716.613.000,00	714.084.884,00	714.084.884,00		859.582.500,00
	1.04.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				95 Unit	64 Unit	76.500.000,00	76.500.000,00	76.500.000,00		78.750.000,00
	1.04.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											

			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	601.290.000,00	601.290.000,00	601.290.000,00		200.000.000,00
2,	**1.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**Persentase Pemenuhan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana**				**100 Persen**	**100 Persen**	**1.284.600.900,00**	**1.286.257.000,00**	**1.051.672.000,00**		**1.011.244.900,00**
	1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	*Terlaksananya pendataan dan Perencanaan Perumahan, rumah susun dan Apartemen*				2 dokumen	4 dokumen	498.370.800,00	500.137.000,00	354.857.000,00		415.497.600,00
	1.04.02.2.01.0006	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus											

			Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus				4 Dokumen	4 Dokumen	498.370.800,00	500.137.000,00	354.857.000,00		415.497.600,00
	1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	*Tersedianya Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana*				10 Unit Rumah	10 Unit Rumah	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00		400.000.000,00
	1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana											

			Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi				10 Unit Rumah	10 Unit Rumah	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00		400.000.000,00
	1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	*Terlaksananya Fasilitasi Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus*				5 lokasi	5 lokasi	286.230.100,00	286.120.000,00	196.815.000,00		195.747.300,00
	1.04.02.2.05.0001	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun											

			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun				5 Laporan	5 Laporan	286.230.100,00	286.120.000,00	196.815.000,00		195.747.300,00
3,	**1.04.03**	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**Persentase Rumah Layak Huni**				**11.09 Persen**	**11.09 Persen**	**7.793.103.590,00**	**42.281.693.590,00**	**42.237.200.692,50**		**40.000.000.000,00**
	1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	*Terlaksananya Rehabilitasi Rumah tidak layak huni*				211 Unit	1197 Unit	7.793.103.590,00	42.281.693.590,00	42.237.200.692,50		40.000.000.000,00
	1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni											

			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki				211 Unit Rumah	1197 Unit Rumah	7.793.103.590,00	42.281.693.590,00	42.237.200.692,50		40.000.000.000,00
4,	**1.04.05**	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**Persentase Perumahan yang Memenuhi Standar**				**50.64 Persen**	**50.64 Persen**	**161.025.918.937,00**	**85.907.716.846,00**	**85.608.859.651,00**		**71.973.298.075,00**
	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	*Terlaksananya Pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan*				705 Lokasi	567 Lokasi	161.025.918.937,00	85.907.716.846,00	85.608.859.651,00		71.973.298.075,00
	1.04.05.2.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan											

			Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan				4 Dokumen	7 Dokumen	1.127.815.000,00	818.368.000,00	818.368.000,00		669.781.875,00
	1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian											
			Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian				185 Lokasi	212 Lokasi	14.540.367.110,00	17.745.746.000,00	17.583.746.000,00		26.250.000.000,00
	1.04.05.2.01.0007	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian											

			Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan				520 Lokasi	355 Lokasi	138.133.139.303,00	54.732.645.928,00	54.449.869.983,00		35.000.000.000,00
	1.04.05.2.01.0010	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang											
			Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang				30 Laporan	30 Laporan	541.444.000,00	537.434.000,00	444.484.000,00		253.516.200,00
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**53.919.771.400,00**	**116.282.283.990,00**	**116.123.246.490,00**		**292.329.770.000,00**
	2.10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**							**53.919.771.400,00**	**116.282.283.990,00**	**116.123.246.490,00**		**292.329.770.000,00**

1,	**2.10.10**	**PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH**	**Persentase Kebutuhan Lahan bagi Kepentingan Umum**				**-**	**35.4 Persen**	**53.919.771.400,00**	**116.282.283.990,00**	**116.123.246.490,00**		**292.329.770.000,00**
	2.10.10.2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	*Tersedianya Lahan Bagi Kepentingan Umum*				-	57 Bidang	53.919.771.400,00	116.282.283.990,00	116.123.246.490,00		292.329.770.000,00
	2.10.10.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah											
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				3 Laporan	4 Laporan	1.402.564.000,00	1.817.844.000,00	1.718.986.500,00		1.335.000.000,00
	2.10.10.2.01.0002	Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota											

			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi untuk Menetapkan Zona Nilai Tanah sebagai Dasar Pelayanan Informasi Nilai Tanah dan Pelayanan Pertanahan Lainnya				1 Dokumen	1 Dokumen	514.841.400,00	373.156.650,00	364.156.650,00		443.770.000,00
	2.10.10.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota											
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota				45 Dokumen	57 Dokumen	52.002.366.000,00	114.091.283.340,00	114.040.103.340,00		290.551.000.000,00
		UPT PEMAKAMAN							**399.633.224.523,00**	**359.117.406.681,00**	**357.830.925.964,00**		**448.803.557.091,00**
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**345.713.453.123,00**	**242.835.122.691,00**	**241.707.679.474,00**		**156.473.787.091,00**
	1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**							**189.684.646.140,00**	**149.685.497.667,00**	**148.791.072.812,50**		**132.373.787.091,00**

1,	**1.04.05**	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**Persentase Sarana dan Prasarana TPU yang terbangun**				**14.14 persen**	**14.14 persen**	**161.025.918.937,00**	**85.907.716.846,00**	**85.608.859.651,00**		**71.973.298.075,00**
	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	*Terlaksananya Pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan*				100 Lokasi	66 Lokasi	161.025.918.937,00	85.907.716.846,00	85.608.859.651,00		71.973.298.075,00
	1.04.05.2.01.0007	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian											
			Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan				13 Lokasi	13 Lokasi	2.200.000.000,00	7.754.980.650,00	7.805.093.150,00		8.000.000.000,00
	1.04.05.2.01.0008	Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan											

			Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum				13 Lokasi	11 Lokasi	4.483.153.524,00	4.318.542.268,00	4.507.298.518,00		1.800.000.000,00
		UPTD PENGELOLAAN AIR BERSIH							**399.633.224.523,00**	**359.117.406.681,00**	**357.830.925.964,00**		**448.803.557.091,00**
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**345.713.453.123,00**	**242.835.122.691,00**	**241.707.679.474,00**		**156.473.787.091,00**
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							**156.028.806.983,00**	**93.149.625.024,00**	**92.916.606.661,50**		**24.100.000.000,00**
1,	**1.03.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**Prosentase Terpenuhinya Pelayanan Pendistribusian Air Bersih Bagi Masyarakat**				**100 Persen**	**100 Persen**	**145.265.937.611,00**	**73.520.386.020,00**	**73.368.851.020,00**		**3.800.000.000,00**

	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Pendistribusian air bersih ke masyarakat*				5000000 Liter	5000000 Liter	145.265.937.611,00	73.520.386.020,00	73.368.851.020,00		3.800.000.000,00
	1.03.03.2.01.0029	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)											
			Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara				2 Unit	2 Unit	3.580.032.340,00	3.552.022.090,00	3.560.063.590,00		3.600.000.000,00
2,	**1.03.07**	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN**	**-**				**-**	**-**	**83.020.060,00**	**0,00**	**0,00**		**3.400.000.000,00**
	1.03.07.2.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	83.020.060,00	0,00	0,00		3.400.000.000,00
	1.03.07.2.01.0036	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan											

		Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota										
			Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dibangun				2 Unit	2 Unit	83.020.060,00	0,00	0,00		3.400.000.000,00
		UPTD PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK							**399.633.224.523,00**	**359.117.406.681,00**	**357.830.925.964,00**		**448.803.557.091,00**
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**345.713.453.123,00**	**242.835.122.691,00**	**241.707.679.474,00**		**156.473.787.091,00**
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							**156.028.806.983,00**	**93.149.625.024,00**	**92.916.606.661,50**		**24.100.000.000,00**
1,	**1.03.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**Persentase Cakupan Layanan Penyedotan Lumpur Tinja**				**0.143 Persen**	**0.143 Persen**	**10.679.849.312,00**	**19.629.239.004,00**	**19.547.755.641,50**		**16.900.000.000,00**

	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya layanan sedot lumpur tinja*				2100 m3	2100 m3	10.679.849.312,00	19.629.239.004,00	19.547.755.641,50		16.900.000.000,00
	1.03.05.2.01.0033	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja											
			Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja				1100 Rumah Tangga	1100 Rumah Tangga	2.763.416.870,00	2.943.476.150,00	2.935.641.900,00		2.500.000.000,00
	1.03.05.2.01.0037	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja											
			Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	54.000.000,00	0,00	0,00		2.700.000.000,00
	1.03.05.2.01.0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)											

			Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara				8 Unit	8 Unit	2.141.406.992,00	3.446.536.404,00	3.450.186.404,00		2.200.000.000,00
	J U M L A H								**399.633.224.523,00**	**359.117.406.681,00**	**357.830.925.964,00**		**448.803.557.091,00**

2.2 ANALISIS KINERJA PERANGKAT DAERAH

Tabel 2. 2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pemakaman Kabupaten Tangerang

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian 2025		Proyeksi		Catatan Analisis
				2024	2025	2026	Triwulan I	Triwulan II	2025	2026	
2	3	4	10	11	12	16	17	18	19	20	
INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH											
2	Rasio luas Kawasan Permukiman, Perumahan dan Pemakaman yang layak			0.9439	0.9442	0.9445			0.9439	0.9442	
3	Persentase Sarana dan Prasarana Permukiman, Perumahan dan Pemakaman yang Berkualitas			100	100	100			100	100	
4	Nilai AKIP Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman			79	80	80.5			80	80.5	
STANDAR PELAYANAN MINIMAL DAN IKK											
No	**Indikator**	**SPM/Standar Nasional**	**IKK**	**Target Renstra Perangkat Daerah**			**Realisasi Capaian 2025**		**Proyeksi**		**Catatan Analisis**
				2024	**2025**	**2026**	**Triwulan I**	**Triwulan II**	**2025**	**2026**	
1	**2**	**3**	**4**	**10**	**11**	**12**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**
	Persentase Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan perpipaan yang terlindungi										

5	terhadap rumah tangga diseluruh kabupaten/kota	√	√	100,00%	100,00%				100,00%	100,00%	
6	Persentase Jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan Pengolahan air limbah domestik	√	√	100,00%	100,00%	100,00%			100,00%	100,00%	
7	Berkurangnya Jumlah Unit Rtlh		√	100,00%	100,00%	100,00%			100,00%	100,00%	
8	Persentase Penetapan Tanah untuk pembangunan fasilitas umum		√	100,00%	100,00%	100,00%			100,00%	100,00%	

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian 2025		Proyeksi		Catatan Analisis
				2024	2025	2026	Triwulan I	Triwulan II	2025	2026	
1	2	3	4	10	11	12	16	17	18	19	20
9	Hunian untuk penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	√	√	100,00%	100,00%	100,00%			100,00%	100,00%	
10	Persentase kawasan Permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/kota yang ditanngani		√	100,00%	100,00%	100,00%			100,00%	100,00%	

11	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, sarana dan Utilitas) Perumahan		√	100,00%	100,00%	100,00%			100,00%	100,00%	
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM											
11	Cakupan Sarana Air bersih			72.67	80.67	88.67			80.67	88.67	
12	Prosentase Terpenuhinya Pelayanan Pendistribusian Air Bersih Bagi Masyarakat			100	100	100	27	73	100	100	
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH											
12	Persentase Sarana Sanitasi yang Dibangun			96.61	96.75	96.88		19.62	96.75	96.88	

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian 2025		Proyeksi		Catatan Analisis
				2024	2025	2026	Triwulan I	Triwulan II	2025	2026	
1	2	3	4	10	11	12	16	17	18	19	20
	Persentase Cakupan Layanan Penyedotan Lumpur Tinja			0.140	0.143	0.146	0.092	0.160	0.143	0.146	
PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN											
14	Persentase Peningkatan kualitas permukiman tidak tertata			100	100	100			100	100	
	Persentase Sarana dan Prasarana TPU yang terbangun			14.14%	14.14%	11.11%			14.14%	11.11%	

	Persentase Sarana dan Prasarana TPU yang Terpelihara			12.12%	14.14%	15.15%			14.14%	15.15%	
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN											
16	Persentase Pemenuhan Pembinaan Pengelolaan Penyelenggaraan, pendataan dan Perencanaan Perumahan, rumah susun dan Apartemen			100	100	100			100	100	
No	**Indikator**	**SPM/Standar Nasional**	**IKK**	**Target Renstra Perangkat Daerah**			**Realisasi Capaian 2025**		**Proyeksi**		**Catatan Analisis**
				2024	**2025**	**2026**	**Triwulan I**	**Triwulan II**	**2025**	**2026**	
1	**2**	**3**	**4**	**10**	**11**	**12**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**
	Persentase Pemenuhan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana			100	100	100			100	100	
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN											
17	Persentase Pemenuhan Perencanaan Pengembangan Kawasan Permukiman			100	100	100			100	100	
	Persentase Rumah Layak Huni			8.27	11.09	14.03		2.77	11.094	14.028	
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)											
18	Persentase Perumahan yang memenuhi Standar			47.89	50.64	54.31			50.64	54.31	

PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH											
18	Persentase Kebutuhan Lahan bagi Kepentingan Umum			30.97	35.40	33.63			35.40	33.63	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											
19	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan			100,00%	100,00%	100,00%	31%	56%	100,00%	100,00%	

Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Beberapa permasalahan pelayanan SKPD Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman Kabupaten Tangerang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Masih terdapatnya permukiman kumuh dan perumahan dengan PSU yang tidak memadai;
2. Belum maksimalnya akses masyarakat terhadap pelayanan air bersih dan sanitasi yang layak;
3. Masih rendahnya proporsi TPU terhadap jumlah penduduk;
4. Belum optimalnya bangunan sarana dan prasarana sanitasi yang memadai mengakibatkan lingkungan permukiman menjadi kumuh;
5. Cakupan pelayanan air minum/bersih perpipaan masih kecil. Belum Optimalnya pelayanan pengelolaan Limbah domestic dari permukiman dan perumahan di wilayah Kabupaten Tangerang

Dampak dari permasalahan tersebut dapat menghambat pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah terutama dalam mewujudkan kualitas sumber daya manusia kabupaten tangerang yang mandiri, berdaya saing tinggi dan berakhlak mulia.

2.3 Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program/kegiatan usulan pemangku kepentingan sebagaimana ketentuan Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 merupakan suatu hasil kajian yang diusulkan pemangku kepentingan sebagai bagian dari pendekatan perencanaan menggunakan sistem perencanaan bawah atas (bottom-up planning) berdasarkan asas demokratisasi dan desentralisasi, baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah. Untuk selanjutnya dilakukan penelaahan kesesuaian usulan dikaitkan dengan isu- isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dan mengakomodasi usulan yang sesuai dengan program/kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah. Berdasarkan uraian diatas, tidak ada usulan pemangku kepentingan yang ditujukan kepada Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman Kabupaten Tangerang.

2.4 Capaian Target dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 Sampai dengan Triwulan II

KODE	URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN %	REALISASI KEGIATAN FISIK (%)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET INDIKATOR	REALISASI INDIKATOR	CAPAIAN (%)
5	**BELANJA DAERAH**									
1.03.03	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**69,808,787,430**	**1,154,217,000**	**1.65**	**5**	**Capaian Program :** Cakupan Sarana Air bersih	**%**	**64.98**	**62.48**	**96.16**
1.03.03.2.01	**PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) DI DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**69,808,787,430**	**1,154,217,000**	**1.65**	**5**	**Keluaran :** Terlaksanya Pembangunan Sarana Air bersih bagi masyarakat	**Unit**	**833**	**68**	**8.16**
1.03.03.2.01.0022	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	69,711,579,930	1,116,767,000	1.6	5	**Keluaran :** Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun	Unit	833	68	8.16
1.03.03.2.01.0024	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	97,207,500	37,450,000	38.53	50	**Keluaran :** Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Orang	150	75	50

1.03.05	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**13,161,927,338**	**2,196,401,000**	**16.69**	**16**	**Capaian Program :** persentase meningkatnya sarana sanitasi bagi masyarakat miskin	**%**	**99.01**	**98.9**	**99.89**
1.03.05.2.01	**PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH DOMESTIK DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**13,161,927,338**	**2,196,401,000**	**16.69**	**16**	**Keluaran :** Terlaksananya Pembangunan sarana sanitasi bagi masyarakat	**Unit**	**1377**	**210**	**15.25**
1.03.05.2.01.0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	13,161,927,338	2,196,401,000	16.69	16	Keluaran : Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	Rumah Tangga	1377	210	15.25
1.04.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA**	**19,633,480,231**	**7,655,906,271**	**38.99**	**45**	**Capaian Program :** Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	**%**	**100**	**45**	**45**
1.04.01.2.01	**PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH**	**374,553,750**	**82,964,000**	**22.15**	**25**	**Keluaran : Tersedianya Dokumen Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**dokumen**	**16**	**4**	**25**

1.04.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	148,236,250	65,714,000	44.33	45	Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	8	2	25
1.04.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	155,667,500	12,070,000	7.75	25	Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	dokumen	4	1	25
1.04.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	70,650,000	5,180,000	7.33	25	Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen	4	1	25
1.04.01.2.02	**ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH**	**15,188,232,047**	**6,741,538,838**	**44.39**	**45**	**Keluaran : Tersedianya Laporan Keuangan**	**dokumen**	**4**	**2**	**50**
1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15,064,224,047	6,688,962,338	44.4	45	Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	78	78	100

1.04.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	124,008,000	52,576,500	42.4	45	Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	dokumen	4	2	50
1.04.01.2.03	**ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH**	**28,640,000**	**15,090,000**	**52.69**	**50**	**Keluaran : Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah**	**bulan**	**12**	**5**	**42**
1.04.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	28,640,000	15,090,000	52.69	50	Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan	12	5	42
1.04.01.2.05	**ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH**	**316,319,000**	**28,266,346**	**8.94**	**20**	**Keluaran : Jumlah pegawai yang difasilitasi**	**Orang**	**301**	**60**	**19.93**
1.04.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	95,040,000	28,266,346	29.74	35	Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	paket	3	1	**33.33**

1.04.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	221,279,000	-	-		Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang	121		
1.04.01.2.06	**ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH**	**1,829,727,150**	**577,250,842**	**31.55**	**32**	**Keluaran : Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**jenis**	***7***	***7***	**100**
1.04.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasirnnListrik/Penerangan Bangunan Kantor	22,945,500	7,635,000	33.27	50	Keluaran : Jumlah Jenis Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	paket	4	2	50
1.04.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	755,023,400	93,260,000	12.35	15	Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	11	2	18
1.04.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	31,051,400	14,680,000	47.28	50	Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	2	1	50
1.04.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	336,448,400	286,659,842	85.2	85	Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	11	5	45
1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	268,940,950	83,936,000	31.21	50	Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket	4	2	50
1.04.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	118,650,000	51,900,000	43.74	45	Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	laporan	2	2	100

1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	296,667,500	39,180,000	13.21	15	Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	lapora n	2	2	100
1.04.01.2.07	**PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**	**203,591,400**	**-**	**-**		**Keluaran : Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**jenis**	**1**		
1.04.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	203,591,400	-	**-**		Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	unit	55		
1.04.01.2.08	**PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**300,542,000**	**77,950,000**	**25.94**	**25**	**Keluaran : Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**jenis**	**3**	**2**	**67**
1.04.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15,162,000	9,900,000	65.29	50	Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	lapora n	12	6	50
1.04.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6,000,000	-	-		Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	lapora n	12		0
1.04.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	279,380,000	68,050,000	24.36	25	Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	lapora n	12	5	42

1.04.01.2.09	**PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**1,391,874,884**	**132,846,245**	**9.54**	**28**	**Keluaran : Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**jenis**	**3**	**2**	**66.67**
1.04.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	714,084,884	108,871,245	15.25	38	Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	78	30	38.46
1.04.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	76,500,000	23,975,000	31.34	31	Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	64	20	31.25
1.04.01.2.09.0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	601,290,000	-	-		Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	3		0
1.04.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**1,051,672,000**	**706,950,000**	**67.22**		**Capaian Program : Persentase Pemenuhan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana**	%	**100**		
						Capaian Program : Persentase Pemenuhan Pembinaan Pengelolaan Penyelenggaraan, pendataan dan	%	**100**		

						Perencanaan Perumahan, rumah susun dan Apartemen				
1.04.02.2.01	**PENDATAAN PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM KABUPATEN/KOTA**	**354,857,000**	**163,750,000**	**46.15**	**45**	**Keluaran : Terlaksananya pendataan dan Perencanaan Perumahan, rumah susun dan Apartemen**	**dokumen**	**4**		
1.04.02.2.01.0006	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	354,857,000	163,750,000	46.15	45	Keluaran : Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	dokumen	4		
1.04.02.2.03	**PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM KABUPATEN/KOTA**	**500,000,000**	**500,000,000**	**100**	**100**	**Keluaran : Tersedianya Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana**	**Unit Rumah**	***7***	***7***	**100**
1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	500,000,000	500,000,000	100	100	Keluaran : Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	Unit Rumah	*7*	*7*	100
1.04.02.2.05	**PEMBINAAN PENGELOLAAN RUMAH SUSUN UMUM DAN/ATAU RUMAH KHUSUS**	**196,815,000**	**43,200,000**	**21.95**	**20**	**Keluaran : Terlaksananya Fasilitasi Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah**	**Lokasi**	**5**	**5**	**100**

						Khusus				
1.04.02.2.05.0001	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	196,815,000	43,200,000	21.95	20	Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	laporan	5	5	100
1.04.03	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**42,237,200,693**	**75,059,000**	**0.18**		**Capaian Program : Persentase Rumah Layak Huni**	%	**11.09**		
1.04.03.2.03	**PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS DI BAWAH 10 (SEPULUH) HA**	**42,237,200,693**	**75,059,000**	**0.18**		**Keluaran : Terlaksananya Rehabilitasi Rumah tidak layak huni**	**unit**	**1197**		
1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	42,237,200,693	75,059,000	0.18		Keluaran : Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	Unit Rumah	1197		
1.04.05	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**73,296,467,983**	**1,258,867,500**	**1.72**		**Capaian Program : Persentase Perumahan yang Memenuhi Standar**	%	**50.64**		
						Persentase Peningkatan kualitas Perumahan dan permukiman tidak tertata	%	**100**		

1.04.05.2.01	**URUSAN PENYELENGGARAAN PSU PERUMAHAN**	**73,296,467,983**	**1,258,867,500**	**1.72**		**Keluaran : Terlaksananya Pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan**	**Lokasi**	**567**		
1.04.05.2.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	818,368,000	616,760,000	75.36	71	Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	dokumen	7	5	71.43
1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	17,583,746,000	198,802,000	1.13		Keluaran : Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	lokasi	212		
1.04.05.2.01.0007	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	54,449,869,983	111,255,500	0.2		Keluaran : Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	Lokasi	355		
1.04.05.2.01.0010	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	444,484,000	332,050,000	74.7	75	Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	laporan	30	17	56.67
2.10.10	**PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH**	**116,123,246,490**	**77,658,278,888**	**66.88**	**46**	**Capaian Program : Prosentase Realisasi lahan yang direncanakan pertahun**	%	**35.4**	**16.15**	**45.61**

2.10.10.2.01	**PENGGUNAAN TANAH YANG HAMPARANNYA DALAM SATU DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**116,123,246,490**	**77,658,278,888**	**66.88**	**46**	**Keluaran : Tersedianya Lahan Bagi Kepentingan Umum**	**Bidang**	**57**	**26**	**46**
2.10.10.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	1,718,986,500	57,900,000	3	25	Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	lapora n	4	1	**25**
2.10.10.2.01.0002	Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	364,156,650	-	-		Keluaran : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi untuk Menetapkan Zona Nilai Tanah sebagai Dasar Pelayanan Informasi Nilai Tanah dan Pelayanan Pertanahan Lainnya	lapora n			
2.10.10.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	114,040,103,340	77,600,378,888	68.05	45	Keluaran : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Bidang	57	26	**45.61**
UPT PEMAKAMAN										
1.04.05	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**11,793,191,668**	**1,690,027,850**	**14.33**	**15**	**Capaian Program :** Persentase Sarana dan Prasarana TPU yang terbangun	%	**14.14**		

						Capaian Program : Persentase Sarana dan Prasarana TPU yang terbangun	%	**14.14**		
1.04.05.2.01	**URUSAN PENYELENGGARAAN PSU PERUMAHAN**	**11,793,191,668**	**1,690,027,850**	**14.33**	**15**	**Keluaran :** Terlaksanany a Pembangunan dan Pemeliharaan sarana dan Prasarana TPU asset Pemda	**Lokasi**	**61**		
1.04.05.2.01.0007	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	7,605,093,150	168,850,000	2.22	5	**Keluaran :** Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	Lokasi	50		
1.04.05.2.01.0008	Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	4,188,098,518	1,521,177,850	36.32	35	**Keluaran :** Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Lokasi	11		
UPTD PENGELOLAAN AIR BERSIH										
1.03.03	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**3,497,663,590**	**684,819,290**	**19.58**	**20**	**Capaian Program :** Prosentase Terpenuhinya Pelayanan Pendistribusia n Air Bersih Bagi Masyarakat	%	**100**	**69.7**	**70**
1.03.03.2.01	**PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) DI DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**3,497,663,590**	**684,819,290**	**19.58**	**20**	**Keluaran :** Terlaksanany a layanan Pendistribusia n air bersih bagi masyarakat	**liter**	**5,000,000**	**3,485,000**	**69.7**

1.03.03.2.01.0029	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	3,497,663,590	684,819,290	19.58	20	**Keluaran :** Jumlah unit SPAM Berbasis Masyarakat yang mendapatkan operasi dan pemeliharaan	unit	2	2	100
UPTD PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK										
1.03.05	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**6,261,028,304**	**1,430,724,200**	**22.85**	**25**	**Capaian Program :** Prosentase kapasitas lumpur tinja	%	**1.06**	**0.67**	**63.09**
1.03.05.2.01	**PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH DOMESTIK DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**6,261,028,304**	**1,430,724,200**	**22.85**	**25**	**Keluaran :** Terlakasanaya layanan sedot lumpur tinja	**m3**	**2100**	**2831**	**134.81**
1.03.05.2.01.0033	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	2,858,841,900	883,478,650	30.9	30	Keluaran : Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Rumah Tangga	1100	1656	150.55
1.03.05.2.01.0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	3,402,186,404	547,245,550	16.09	20	Keluaran : Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Diperasikan dan Dipelihara	Unit	8	8	100

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

.

3.1. PROGRAM DAN KEGIATAN

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pemakaman Kabupaten Tangerang telah melakukan mapping program dan kegiatan pada Renstra 2024 – 2026 dalam rangka mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, Indikator kinerja pada program – program Tahun 2025 sebagai berikut :

Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman Kabupaten Tangerang memiliki 1 urusan yaitu Urusan Perumahan, Permukiman dan Pemakaman pada Tahun Tahun 2025 terdiri atas 8 (delapan) Program 16 (enam belas) Kegiatan dan 45 Sub Kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
    a. Kegiatan Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi KinerjaPerangkat Daerah dengan sub kegiatan :
        - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
        - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja danIkhtisar Realisasi Kinerja SKPD
        - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
        - Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan subkegiatan :
        - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
        - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD
    b. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada PerangkatDaerah, dengan sub kegiatan :
        - Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
    c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengansub kegiatan :
        - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas danFungsi
    d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan subkegiatan :
        - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- Fasilitasi Kunjungan Tamu
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan :

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan :

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

a. Kegiatan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Spam) Di Daerah Kabupaten/Kota:

- Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
- Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)

3. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH

a. Kegiatan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten/Kota :

- Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat
- Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah

Domestik (SPALD)

- Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja
- Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)

4. PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN

a . Kegiatan Penyelenggaraan Infrastruktur Pada Permukiman Di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :

- Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota
- Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota

5. PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN

a. Kegiatan Pendataan Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :

- Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus
- Kegiatan Pembangunan Dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
- Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana

b. Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum Dan/Atau Rumah

Khusus, dengan sub kegiatan :

- Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun

6. PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN

a . Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas Di Bawah 10 (Sepuluh) Ha, dengan sub kegiatan :

- Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh
- Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh
- Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh

7. PROGRAM PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)

a. Kegiatan Urusan Penyelenggaraan Psu Perumahan, dengan sub kegiatan :

- Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan
- Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
- Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan
- Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
- Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang

8. PROGRAM PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH

a. Kegiatan Penggunaan Tanah Yang Hamparannya Dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :

- Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah
- Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah
  Kabupaten/Kota

Tabel. 3.1
Perubahan Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman Kab. Tangerang Tahun 2025

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2025				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			Lokasi & Kelompok Sasaran	Target Capaian Kinerja 2025	APBD 2025	Sumber Dana	TARGET	KEBUTUHAN PAGU INDIKATIF (Rp)
	DINAS PERUMAHAN, PEMUKIMAN DAN PEMAKAMAN				**359.117.406.681,00**			**448.803.557.091,00**
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**242.835.122.691,00**			**156.473.787.091,00**
1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**				**93.149.625.024,00**			**24.100.000.000,00**
1.03.03	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**Cakupan Sarana Air Bersih**			**73.520.386.020,00**			**3.800.000.000,00**
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Pembangunan sarana air bersih bagi masyarakat*			73.520.386.020,00			3.800.000.000,00
1.03.03.2.01.0022	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan							

		Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun			69.841.753.930,00			0,00
1.03.03.2.01.0024	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)							
		Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)			126.610.000,00			200.000.000,00
1.03.05	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**Persentase Sarana Sanitasi yang Dibangun**			**19.629.239.004,00**			**16.900.000.000,00**
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Terbangunnya Sarana Sanitasi bagi masyarakat*			19.629.239.004,00			16.900.000.000,00
1.03.05.2.01.0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat							

		Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar			13.239.226.450,00			9.500.000.000,00
1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**				**149.685.497.667,00**			**132.373.787.091,00**
1.04.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan**			**20.209.830.231,00**			**19.389.244.116,00**
1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Tersedianya Dokumen Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah*			521.127.000,00			450.378.636,00
1.04.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			186.161.000,00			122.887.406,00
1.04.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			201.170.000,00			294.056.815,00
1.04.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							

		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			133.796.000,00			33.434.415,00
1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Tersedianya Laporan Keuangan*			15.205.352.047,00			15.104.520.680,00
1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			15.064.224.047,00			15.031.232.213,00
1.04.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD							
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD			141.128.000,00			73.288.467,00
1.04.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah*			29.895.000,00			29.800.300,00
1.04.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD							

		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD			29.895.000,00			29.800.300,00
1.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah pegawai yang difasilitasi*			378.812.000,00			250.000.000,00
1.04.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya							
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			95.040.000,00			0,00
1.04.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi							
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			283.772.000,00			250.000.000,00
1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah*			2.178.635.900,00			2.071.650.000,00
1.04.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			22.945.500,00			24.150.000,00

1.04.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			755.023.400,00			630.000.000,00
1.04.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			31.051.400,00			36.750.000,00
1.04.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			336.448.400,00			315.000.000,00
1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			329.032.200,00			330.750.000,00
1.04.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu							
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			150.200.000,00			157.500.000,00
1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							

		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			553.935.000,00			577.500.000,00
1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*			203.591.400,00			210.000.000,00
1.04.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel							
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			203.591.400,00			210.000.000,00
1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*			300.542.000,00			134.562.000,00
1.04.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			15.162.000,00			15.162.000,00
1.04.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			6.000.000,00			14.400.000,00
1.04.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							

		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			279.380.000,00			105.000.000,00
1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*			1.391.874.884,00			1.138.332.500,00
1.04.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			714.084.884,00			859.582.500,00
1.04.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			76.500.000,00			78.750.000,00
1.04.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			601.290.000,00			200.000.000,00
1.04.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**Persentase Pemenuhan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana**			**1.286.257.000,00**			**1.011.244.900,00**

1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	*Terlaksananya pendataan dan Perencanaan Perumahan, rumah susun dan Apartemen*			500.137.000,00			415.497.600,00
1.04.02.2.01.0006	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus							
		Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus			500.137.000,00			415.497.600,00
1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	*Tersedianya Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana*			500.000.000,00			400.000.000,00
1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana							
		Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi			500.000.000,00			400.000.000,00

1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	*Terlaksananya Fasilitasi Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus*			286.120.000,00			195.747.300,00
1.04.02.2.05.0001	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun							
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun			286.120.000,00			195.747.300,00
1.04.03	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**Persentase Rumah Layak Huni**			**42.281.693.590,00**			**40.000.000.000,00**
1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	*Terlaksananya Rehabilitasi Rumah tidak layak huni*			42.281.693.590,00			40.000.000.000,00
1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni							
		Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki			42.281.693.590,00			40.000.000.000,00
1.04.05	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**Persentase Perumahan yang Memenuhi Standar**			**85.907.716.846,00**			**71.973.298.075,00**

1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	*Terlaksananya Pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan*			85.907.716.846,00			71.973.298.075,00
1.04.05.2.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan							
		Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan			818.368.000,00			669.781.875,00
1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian							
		Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian			17.745.746.000,00			26.250.000.000,00
1.04.05.2.01.0007	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian							
		Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan			54.732.645.928,00			35.000.000.000,00

1.04.05.2.01.0010	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang							
		Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang			537.434.000,00			253.516.200,00
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**116.282.283.990,00**			**292.329.770.000,00**
2.10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**				**116.282.283.990,00**			**292.329.770.000,00**
2.10.10	**PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH**	**Persentase Kebutuhan Lahan bagi Kepentingan Umum**			**116.282.283.990,00**			**292.329.770.000,00**
2.10.10.2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	*Tersedianya Lahan Bagi Kepentingan Umum*			116.282.283.990,00			292.329.770.000,00
2.10.10.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah							
		Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota			1.817.844.000,00			1.335.000.000,00
2.10.10.2.01.0002	Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota							

		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi untuk Menetapkan Zona Nilai Tanah sebagai Dasar Pelayanan Informasi Nilai Tanah dan Pelayanan Pertanahan Lainnya			373.156.650,00			443.770.000,00
2.10.10.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota							
		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota			114.091.283.340,00			290.551.000.000,00
	UPT PEMAKAMAN				**359.117.406.681,00**			**448.803.557.091,00**
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**242.835.122.691,00**			**156.473.787.091,00**
1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**				**149.685.497.667,00**			**132.373.787.091,00**
1.04.05	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**Persentase Sarana dan Prasarana TPU yang terbangun**			**85.907.716.846,00**			**71.973.298.075,00**
1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	*Terlaksananya Pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan*			85.907.716.846,00			71.973.298.075,00
1.04.05.2.01.0007	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian							

		Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan			7.754.980.650,00			8.000.000.000,00
1.04.05.2.01.0008	Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan							
		Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum			4.318.542.268,00			1.800.000.000,00
	UPTD PENGELOLAAN AIR BERSIH				**359.117.406.681,00**			**448.803.557.091,00**
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**242.835.122.691,00**			**156.473.787.091,00**
1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**				**93.149.625.024,00**			**24.100.000.000,00**
1.03.03	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**Prosentase Terpenuhinya Pelayanan Pendistribusian Air Bersih Bagi Masyarakat**			**73.520.386.020,00**			**3.800.000.000,00**
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Pendistribusian air bersih ke masyarakat*			73.520.386.020,00			3.800.000.000,00
1.03.03.2.01.0029	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)							

		Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara			3.552.022.090,00			3.600.000.000,00
1.03.07	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN**	**-**			**0,00**			**3.400.000.000,00**
1.03.07.2.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	-			0,00			3.400.000.000,00
1.03.07.2.01.0036	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota							
		Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dibangun			0,00			3.400.000.000,00
	UPTD PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK				**359.117.406.681,00**			**448.803.557.091,00**
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**242.835.122.691,00**			**156.473.787.091,00**
1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**				**93.149.625.024,00**			**24.100.000.000,00**
1.03.05	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**Persentase Cakupan Layanan Penyedotan Lumpur Tinja**			**19.629.239.004,00**			**16.900.000.000,00**

1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya layanan sedot lumpur tinja*			19.629.239.004,00			16.900.000.000,00
1.03.05.2.01.0033	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja							
		Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja			2.943.476.150,00			2.500.000.000,00
1.03.05.2.01.0037	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja							
		Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan			0,00			2.700.000.000,00
1.03.05.2.01.0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)							
		Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara			3.446.536.404,00			2.200.000.000,00
J U M L A H					**359.117.406.681,00**			**448.803.557.091,00**

Tabel 3.2
Target Indikator Kinerja Kunci (IKK)
Tahun 2025 Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman

No	Indikator	Capaian Tahun 2024	Target Tahun 2025	
			Sebelum Perubahaan	Sesudah Perubahan
1	2	4	3	4
1	Persentase Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melaluiSPAM Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan perpipaan yang terlindungi terhadap rumah tangga diseluruh kabupaten/kota	53.05%	100,00%	100,00%
2	Persentase Jumlah rumahtangga yang memperoleh layanan Pengolahan air limbah domestik	98.02%	100,00%	100,00%
3	Berkurangnya Jumlah UnitRtlh	3.11%	100,00%	100,00%
4	Persentase Penetapan Tanah untuk pembangunanfasilitas umum	96.61%	100,00%	100,00%

No	Indikator	Capaian Tahun 2024	Target Tahun 2025	
			Sebelum Perubahaan	Sesudah Perubahan
1	2	4	3	4
5	Hunian untuk penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	100,00%	100,00%	100,00%
6	Persentase kawasan Permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/kota yang ditanngani	3%	100,00%	100,00%
7	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, sarana dan Utilitas) Perumahan	29.30%	100,00%	100,00%

BAB IV
PENUTUP

4.1 CATATAN-CATATAN

Dokumen Perubahan Renja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman Kabupaten Tangerang Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan yang harus dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program kegiatan dan Sub Kegiatan selama tahun 2025 di lingkup Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman Kabupaten Tangerang. Perubahan Renja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman Kabupaten Tangerang tahun 2025 berpedoman kepada Perubahan RKPD Tahun 2025 dan telah memuat hasil evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan Sub Kegiatan hingga triwulan II tahun anggaran 2025, serta memuat permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman Kabupaten Tangerang dalam pelaksanaan program kegiatan dan Sub Kegiatan.

Dalam hal adanya kebijakan terkait kondisi keuangan daerah yang akan mempengaruhi pelaksanaan Perubahan Renja ini maka optimalisasi dalam pelaksanaan isi Perubahan Renja ini melalui perubahan strategi pelaksanaan merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan, sesuai dengan kewenangan urusan penunjang yang diemban oleh Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman Kabupaten Tangerang sebagai salah satu perangkat daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Tangerang. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan isi Perubahan Renja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman Kabupaten Tangerang Tahun 2025 ini.

Terdapat beberapa hal yang perlu di perhatikan dalam perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 adalah:

1. Catatan Penting Renja Perubahan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman Kabupaten Tangerang disusun sejalan dengan penjabaran dari tujuan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman Kabupaten Tangerang yang tertuang dalam Renstra yaitu :
    a. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Permukiman Perumahan dan Pemakaman
    b. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Diharapkan melalui Renja yang disusun dengan mekanisme perencanaan yang komprehensif dan terpadu ini, kinerja pembangunan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman Kabupaten Tangerang dapat semakin fokus untuk menyelesaikan berbagai permasalahan aktual yang masih dihadapi saat ini.

4.2 KAIDAH – KAIDAH PELAKSANAAN

Kaidah-kaidah Pelaksanaan Dalam rangka pelaksanaan renja tahun 2025, maka diperlukan kaidah-kaidah pelaksanaan supaya program kegiatan dan Sub Kegiatan yang telah direncanakan sesuai

dengan harapan pembangunan. Adapun beberapa kaidah-kaidah pelaksanaan adalah sebagai berikut:

1. Dalam melaksanakan Renja Perubahan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman ini seluruh aparatur di lingkungan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman mempunyai tanggungjawab untuk melaksanakan Renja tersebut dengan sebaikbaiknya;
2. Renja Perubahan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman Kabupaten Tangerang haruslah berpedoman kepada Perubahan RKPD dan disinkronkan dengan prioritas pembangunan nasional dan propinsi supaya perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan selaras dan bersinergi;
3. Dokumen Renja Perubahan ini kemudian menjadi acuan dalam menyusun Rencana Perubahan Kerja dan Anggaran (RKPA) program kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025;
4. Dokumen Renja Perubahan ini digunakan sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat tahunan.

4.3. RENCANA TINDAK LANJUT

Rencana Tindak Lanjut Untuk mencapai target sasaran Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman Kabupaten Tangerang yang telah ditetapkan pada tahun 2025 maka perlu didukung dengan program, kegiatan dan sub kegiatan. Agar program dan kegiatan tersebut dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan maka perlu dilakukan koordinasi lintas Unit Kerja/Perangkat Daerah dalam rangka sinergitas.

Demikian kiranya Rencana Kerja Perubahan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman Kabupaten Tangerang Tahun 2025 ini disusun. Semoga dokumen ini dapat bermanfaat sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas secara berkesinambungan.

14. Satuan Polisi Pamong Praja

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dengan ditetapkannya **Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)**, setiap daerah diwajibkan menyusun dokumen perencanaan pembangunan secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan responsif terhadap dinamika perubahan. Jenjang perencanaan meliputi: **Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)**, **Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)**, dan **Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**.

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan RKPD, setiap **Organisasi Perangkat Daerah (OPD)** juga diwajibkan menyusun **Rencana Kerja (Renja) OPD**, yang berpedoman pada Renstra OPD serta mengacu pada dokumen RKPD tahun berjalan. RKPD menjadi dasar penyusunan **RAPBD, KUA, dan PPAS**, serta disusun secara partisipatif melalui mekanisme **Musrenbang**.

Penyusunan dan perubahan dokumen Renja OPD dilaksanakan berdasarkan **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017**, serta disesuaikan dengan **Permendagri Nomor 90 Tahun 2019** dan **Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023** mengenai pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur pembangunan dan keuangan daerah. Seluruh proses diselaraskan melalui platform **Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)**.

Dalam hal ini, **Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tangerang** menyusun **Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025** sebagai bentuk penyesuaian terhadap dinamika pelaksanaan program dan kegiatan, kebutuhan riil masyarakat, hasil evaluasi triwulan, serta adanya penyesuaian terhadap kebijakan anggaran dan prioritas pembangunan daerah.

Rencana Kerja Perubahan ini disusun untuk memperkuat pencapaian target pembangunan daerah dan mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satpol PP yang diatur dalam berbagai regulasi, seperti:

- **Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018** tentang Satpol PP
- **Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016** tentang Perangkat Daerah
- **Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 2 Tahun 2022**, dan
- **Peraturan Bupati Tangerang Nomor 18 Tahun 2023** tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Satpol PP

Satpol PP Kabupaten Tangerang memiliki tiga tugas utama, yaitu:

1. Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah,
2. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, dan
3. Perlindungan masyarakat.

Ketiga tugas tersebut merupakan bagian dari urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, sebagaimana diamanatkan dalam **Pasal 255 ayat (1)** dan **Pasal 298 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014** tentang Pemerintahan Daerah.

Oleh karena itu, penyusunan **Renja Perubahan Tahun 2025** ini bertujuan untuk menyempurnakan perencanaan program dan kegiatan

agar tetap relevan, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan tantangan di lapangan. Dokumen ini juga diharapkan menjadi pedoman yang efektif dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP Kabupaten Tangerang, serta mendukung pencapaian sasaran pelayanan publik yang telah ditetapkan.

1.2 LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tangerang Tahun 2025 adalah:

a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4421);
c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
d. Undang-Undang Nomor 01 tahun 2022 Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178) ;
f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322;
g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016, tentang Perangkat Daerah;
h. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
i. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1 114);
l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodetifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1147);
m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
n. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
o. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
p. Peraturan Gubernur Banten 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Banten 2023-2026 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2022 Nomor 3);
q. Peraturan Gubernur Banten Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2024 Nomor 11).
r. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 12);
s. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2022 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0222);
t. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum Serta Pelindungan Masyarakat;
u. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tangerang;
v. Peraturan Bupati Kabupaten Tangerang Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2023 Nomor 39);
w. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 16 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2025.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Penyusunan **Rencana Kerja Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tangerang Tahun 2025** dimaksudkan untuk:

1. **Menyesuaikan Dokumen Perencanaan dengan Kondisi Aktual:** Menyediakan kerangka perencanaan yang responsif terhadap dinamika dan perubahan kebijakan, kebutuhan masyarakat, serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun berjalan.

2. **Menjamin Keterpaduan dan Konsistensi Perencanaan:** Menyesuaikan program dan kegiatan Satpol PP dengan arah kebijakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Tahun 2025 dan dokumen RPD Kabupaten Tangerang.
3. **Mendukung Akuntabilitas Pelaksanaan Tugas:** Memastikan bahwa setiap perubahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan tetap mengacu pada prinsip efektivitas, efisiensi, dan transparansi dalam pengelolaan sumber daya daerah.
4. **Meningkatkan Kualitas Manajemen Kinerja:** Menetapkan indikator kinerja yang relevan dan terukur sebagai acuan dalam pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi program Satpol PP.

Rencana Kerja Perubahan ini bertujuan untuk:

1. **Menguatkan Respons Satpol PP terhadap Perubahan Prioritas Daerah:**
   Menyusun kembali rencana operasional tahunan berdasarkan prioritas baru atau penyesuaian kebijakan pemerintah daerah.
2. **Meningkatkan Relevansi Program dan Kegiatan:** Memastikan bahwa program, kegiatan, dan subkegiatan yang dilaksanakan Satpol PP tetap selaras dengan kebutuhan masyarakat dan arah pembangunan Kabupaten Tangerang Tahun 2025.
3. **Memfokuskan Sumber Daya secara Optimal:** Menyusun ulang perencanaan penggunaan anggaran, sumber daya manusia, serta logistik agar lebih efektif dan tepat sasaran.
4. **Menjamin Keberlanjutan Layanan Trantibum dan Linmas:** Menjamin bahwa upaya penegakan perda, perlindungan masyarakat, dan ketertiban umum tetap berjalan optimal meskipun terjadi perubahan kebijakan atau asumsi dasar.
5. **Memperkuat Koordinasi Lintas Sektor:** Memperkuat sinergi Satpol PP dengan perangkat daerah lain, Forkopimda, serta elemen masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif.

Dengan maksud dan tujuan tersebut, diharapkan **Renja Perubahan Tahun 2025** dapat menjadi instrumen manajerial yang adaptif, akuntabel, dan berorientasi hasil dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP Kabupaten Tangerang.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Penyajian Dokumen Renja Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2025 disusun menurut sistematika dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini memuat Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penulisan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

Pada bab ini memuat Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Perubahan sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan, analisis kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tangerang, Permasalahan dan Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tangerang, Review terhadap rancangan awal RKPD Perubahan serta Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN TANGERANG

Pada bab ini memuat Rencana Kerja dan Pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tangerang Tahun 2025.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini menjelaskan kesimpulan dan saran perubahan dan catatan pelaksanaan tindak lanjut

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Sampai dengan Triwulan II Tahun Berkenaan

Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tangerang adalah penjabaran dari Rencana Kerja Tahunan yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tangerang sebagai Pelaksana Teknis Pembangunan Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat.

Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tangerang Tahun 2024 juga harus dilakukan evaluasi.

Evaluasi terhadap Rencana Kinerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tangerang Tahun 2024 meliputi kebijakan perencanaan program & kegiatan, dan pelaksanaan rencana program & kegiatan. Berdasarkan program dan kegiatan yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tangerang telah melaksanakan sejumlah kegiatan melalui program yang ada dengan dana APBD Tahun 2024 termasuk Perubahan Anggaran yaitu sebesar **Rp. 44.228.955.467,00-** dan Tahun 2025 dengan anggaran **Rp. 35.484.232.298,00-** dengan rekapitulasi Evaluasi Renja Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 2.1
Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tangerang
Tahun Anggaran 2024 dan 2025 (s.d Triwulan II (13 JUNI 2025))

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Tahun 2024			Tahun 2025 (s.d Triwulan II (13 JUNI 2025)		
		Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Capaian (%)	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Capaian (%)
01.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**	**Rp44.228.955.467**	**Rp42.941.932.326**	**97,09**	**Rp35.484.232.298**	**Rp15.872.272.454**	**44,73%**
01.05.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA**	**Rp26.762.522.731**	**Rp26.278.590.400**	**98,19**	**Rp29.911.742.498**	**Rp13.623.498.804**	**45,55%**
1.05.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Rp820.396.290**	**Rp766.675.900**	**93,45**	**Rp526.574.375**	**Rp82.220.150**	**15,61%**
1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp320.269.090	Rp269.259.090	84,07	Rp219.240.425	Rp57.818.100	26,37%
1.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp55.945.000	Rp55.945.000	100,00	Rp36.660.000	Rp12.500.000	34,10%
1.05.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp13.196.000	Rp13.196.000	100,00	Rp6.660.000	Rp0	0,00%
1.05.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp5.902.000	Rp5.902.000	100,00	Rp4.348.000	Rp0	0,00%
1.05.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Rp5.902.000	Rp5.902.000	100,00	Rp4.348.000	Rp0	0,00%
1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp6.621.500	Rp6.621.500	100,00	Rp4.894.300	Rp0	0,00%
1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp412.560.700	Rp409.850.310	99,34	Rp250.423.650	Rp11.902.050	4,75%
1.05.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Rp14.719.803.553**	**Rp14.594.365.026**	**99,15**	**Rp18.484.981.457**	**Rp9.058.456.704**	**49,00%**
1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp14.406.176.553	Rp14.285.238.026	99,16	Rp18.350.610.507	Rp9.018.985.429	49,15%
1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp76.875.900	Rp75.475.900	98,18	Rp37.729.850	Rp0	0,00%

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Tahun 2024			Tahun 2025 (s.d Triwulan II (13 JUNI 2025)		
		Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Capaian (%)	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Capaian (%)
1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Rp236.751.100	Rp233.651.100	98,69	Rp96.641.100	Rp39.471.275	40,84%
1.05.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Rp910.656.600**	**Rp900.555.000**	**98,89**	**Rp593.360.000**	**Rp558.153.000**	**94,07%**
1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Rp749.781.600	Rp739.680.000	98,65	Rp593.360.000	Rp558.153.000	94,07%
1.05.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Rp54.000.000	Rp54.000.000	100,00	Rp0	Rp0	0,00%
1.05.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp106.875.000	Rp106.875.000	100,00	Rp0	Rp0	0,00%
1.05.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Rp2.168.842.020**	**Rp2.007.004.574**	**92,54**	**Rp2.189.727.050**	**Rp544.467.450**	**24,86%**
1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp34.904.800	Rp34.738.000	99,52	Rp47.737.500	Rp0	0,00%
1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp958.483.100	Rp943.274.600	98,41	Rp1.015.143.100	Rp169.542.800	16,70%
1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp149.995.000	Rp148.908.200	99,28	Rp106.879.900	Rp56.229.500	52,61%
1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp81.285.500	Rp79.428.250	97,72	Rp87.439.500	Rp87.115.300	99,63%
1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp101.051.620	Rp94.753.250	93,77	Rp185.302.050	Rp61.464.850	33,17%
1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp47.328.000	Rp47.328.000	100,00	Rp152.640.000	Rp51.380.000	33,66%
1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp266.000.000	Rp265.896.000	99,96	Rp376.170.000	Rp60.380.000	16,05%
1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp529.794.000	Rp392.678.274	74,12	Rp218.415.000	Rp58.355.000	26,72%
1.05.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Rp336.057.100**	**Rp301.000.000**	**89,57**	**Rp0**	**Rp0**	**0,00%**
1.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp336.057.100	Rp301.000.000	89,57	Rp0	Rp0	0,00%
1.05.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Rp6.190.312.400**	**Rp6.189.815.000**	**99,99**	**Rp6.332.655.568**	**Rp2.702.061.500**	**42,67%**

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Tahun 2024			Tahun 2025 (s.d Triwulan II (13 JUNI 2025)		
		Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Capaian (%)	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Capaian (%)
1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp15.000.000	Rp15.000.000	100,00	Rp15.000.000	Rp7.500.000	50,00%
1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp28.800.000	Rp28.317.000	98,32	Rp46.800.000	Rp23.400.000	50,00%
1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp6.146.512.400	Rp6.146.498.000	100,00	Rp6.270.855.568	Rp2.671.161.500	42,60%
1.05.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Rp1.616.454.768**	**Rp1.519.174.900**	**93,98**	**Rp1.784.444.048**	**Rp678.140.000**	**38,00%**
1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp987.737.768	Rp929.596.900	94,11	Rp923.490.048	Rp401.486.000	43,47%
1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp382.647.000	Rp357.648.000	93,47	Rp445.054.000	Rp238.654.000	53,62%
1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp73.150.000	Rp61.957.000	84,70	Rp101.500.000	Rp38.000.000	37,44%
1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp172.920.000	Rp169.973.000	98,30	Rp314.400.000	Rp0	0,00%
01.05.02	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Rp17.466.432.736**	**Rp16.663.341.926**	**95,40**	**Rp5.572.489.800**	**Rp2.248.773.650**	**40,35%**
1.05.02.2.01	**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Rp16.470.707.026**	**Rp15.714.929.616**	**95,41**	**Rp5.202.469.200**	**Rp2.069.667.500**	**39,78%**
1.05.02.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Rp4.570.642.330	Rp4.505.138.176	98,57	Rp856.960.550	Rp832.751.050	97,17%
1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp8.252.161.396	Rp7.860.356.700	95,25	Rp116.580.000	Rp54.572.000	46,81%
1.05.02.2.01.0008	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Rp50.977.600	Rp50.977.600	100,00	Rp604.363.650	Rp283.727.500	46,95%

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Tahun 2024			Tahun 2025 (s.d Triwulan II (13 JUNI 2025)		
		Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Capaian (%)	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Capaian (%)
1.05.02.2.01.0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp885.953.590	Rp876.845.390	98,97	Rp37.927.450	Rp0	0,00%
1.05.02.2.01.0014	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Rp850.687.200	Rp844.450.900	99,27	Rp131.305.150	Rp47.565.150	36,22%
1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Rp447.839.550	Rp446.413.550	99,68	Rp1.612.357.000	Rp642.717.900	39,86%
1.05.02.2.01.0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Rp1.174.133.860	Rp919.853.800	78,34	Rp844.864.400	Rp203.871.400	24,13%
1.05.02.2.01.0017	Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Rp25.000.000	Rp0	0,00	Rp25.000.000	Rp0	0,00%
1.05.02.2.01.0018	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp213.311.500	Rp210.893.500	98,87	Rp973.111.000	Rp4.462.500	0,46%
1.05.02.2.02	**Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**	**Rp557.906.600**	**Rp513.056.200**	**91,96**	**Rp222.350.150**	**Rp112.695.750**	**50,68%**
1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota				Rp44.709.850	Rp23.006.000	51,46%
1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Rp117.309.200	Rp115.525.200	99,27	Rp47.840.100	Rp24.046.000	50,26%
1.05.02.2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Rp440.597.400	Rp397.531.000	90,23	Rp129.800.200	Rp65.643.750	50,57%

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Tahun 2024			Tahun 2025 (s.d Triwulan II (13 JUNI 2025)		
		Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Capaian (%)	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Capaian (%)
1.05.02.2.03	**Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota**	**Rp437.819.110**	**Rp435.356.110**	**99,44**	**Rp147.670.450**	**Rp66.410.400**	**44,97%**
1.05.02.2.03.0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Rp437.819.110	Rp435.356.110	99,44	Rp147.670.450	Rp66.410.400	44,97%

Tabel 2.2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tangerang

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
			Satuan	Target	Target Renja Perangkat Daerah tahun (2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7=(6/5)	8	9=(6+8)	10=(9/4)
01.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**									
01.05.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA**	**Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan**	**Persen**	**300**	**100**	**100**	**100,00%**	**100**	**200**	**66,67%**
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen perencanaan dan Pelaporan	Persen	300	100	100	100,00%	100	200	66,67%

1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	300	100	100	100,00%	100	200	66,67%
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur	Persen	300	100	100	100,00%	100	200	66,67%
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	300	100	100	100,00%	100	200	66,67%
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	300	100	100	100,00%	100	200	66,67%
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang	Persen	300	100	100	100,00%	100	200	66,67%
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persen	300	100	100	100,00%	100	200	66,67%
01.05.02	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persen**	**300**	**100**	**98,76**	**98,76%**	**100**	**198,76**	**66,25%**
		Persentase Linmas yang terlatih	Persen	33	11	11	100,00%	11	22	66,67%
		Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja	Persen	300	100	100	100,00%	100	200	66,67%

		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakan	Persen	300	100	100	100,00%	100	200	66,67%
1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Persen	300	100	100	100,00%	100	200	66,67%
		Persentase Penanganan Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Persen	300	100	100	100,00%	100	200	66,67%
		Persentase Penanganan Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Persen	300	100	100	100,00%	100	200	66,67%
1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Penanganan Pelanggaran PERDA dan PERKADA	Persen	300	100	100	100,00%	100	200	66,67%
1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Persentase Aparatur PPNS Yang Terbina	Persen	300	100	100	100,00%	100	200	66,67%

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN TANGERANG

Kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Tangerang sangat erat kaitannya dengan pemenuhan **Standar Pelayanan Minimal (SPM)** sebagai acuan dalam menjamin mutu layanan dasar yang menjadi hak setiap warga negara. SPM memberikan kerangka normatif dan kuantitatif untuk menilai efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pelayanan Satpol PP, khususnya pada sub-urusan **ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat** yang merupakan urusan pemerintahan wajib non-pelayanan dasar.

Berdasarkan **Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal**, serta **Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan SPM**, dan didukung dengan regulasi pelaksana lainnya seperti **Permendagri Nomor 121 Tahun 2018** dan **Peraturan Bupati Tangerang Nomor 64 Tahun 2019**, Satpol PP berkewajiban mengimplementasikan jenis dan mutu pelayanan dasar sesuai standar teknis yang telah ditentukan.

Dalam praktiknya, evaluasi terhadap capaian kinerja pelayanan menunjukkan bahwa terdapat kebutuhan untuk melakukan penyesuaian pada beberapa program dan kegiatan, baik dari sisi **alokasi sumber daya, indikator kinerja, maupun pendekatan pelayanan**. Hal ini menjadi salah satu dasar utama disusunnya dokumen **Renja Perubahan Tahun 2025**, sebagai bentuk adaptasi terhadap dinamika kebutuhan masyarakat, hasil evaluasi triwulanan, dan pergeseran prioritas pembangunan daerah.

Strategi yang akan diperkuat dalam rangka pencapaian dan peningkatan mutu pelayanan sesuai SPM antara lain meliputi:

- **Peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia**, melalui pelatihan teknis berbasis SPM;
- **Penguatan sistem pengawasan dan pengendalian operasional**, berbasis data dan pelaporan terukur;
- **Pemanfaatan teknologi informasi** untuk layanan tanggap pelanggaran dan aduan masyarakat;
- **Koordinasi lintas sektor** dalam pelaksanaan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- **Penyesuaian target dan indikator kinerja pelayanan**, baik dari sisi output maupun outcome.

Dengan mengimplementasikan Standar Pelayanan Minimal secara konsisten dan adaptif, Satpol PP Kabupaten Tangerang diharapkan dapat menjaga kualitas layanan, meningkatkan kepuasan masyarakat, serta memperkuat legitimasi lembaga dalam penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum yang profesional.Capaian kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tangerang dapat dilihat pada Tabel 3.3.

TABEL 3.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Tangerang

No	Indikator Kinerja Utama	SPM/ standar nasional	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian		Proyeksi	
			Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2024	Tahun 2025 (s.d Triwulan I)	Tahun 2025	Tahun 2026
1	Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)		100%	100%	100%	99,84%	17,96%	100%	100%
2		Kategori Indeks Pencapaian SPM Trantibum	100%	100%	100%	100%	44,10%	100%	100%

2.3. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN TANGERANG

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Tangerang dibentuk berdasarkan **Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022** tentang Perubahan atas **Perda Nomor 11 Tahun 2016** mengenai Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Tugas pokok, fungsi, dan struktur operasional Satpol PP dijabarkan lebih lanjut melalui **Peraturan Bupati Tangerang Nomor 18 Tahun 2023** tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satpol PP Kabupaten Tangerang.

Satpol PP memiliki mandat untuk membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan urusan pemerintahan di bidang penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta perlindungan masyarakat, baik dalam konteks kewenangan daerah maupun tugas pembantuan dari pemerintah pusat.\

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, terutama menjelang dan selama pelaksanaan Tahun Anggaran 2025, serta berdasarkan evaluasi triwulan dan pemutakhiran dokumen RKPD, ditemukan sejumlah permasalahan utama yang menjadi dasar perubahan rencana kerja. Permasalahan-permasalahan tersebut antara lain:

1. Belum terjalinnya sinergitas yang intensif dengan Perangkat Daerah dan Aparat keamanan di Wilayah terkait permasalahan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
2. Kurangnya personil Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang tidak sesuai dengan luas wilayah Kabupaten Tangerang atau

belum memenuhi standar minimal kebutuhan personil yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja;
3. Belum adanya sinergitas penyelesaian/tindaklanjut pasca penindakan/penertiban ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
4. Kurangnya koordinasi dan pemahaman Kepala Desa terkait keanggotaan Satlinmas sehingga apabila berganti kepemimpinan, keanggotaan Satlinmas kembali berubah-ubah;
5. SDM di Satpol PP banyak yang tidak memenuhi kualifikasi sebagai PPNS;
6. Terbatasnya anggaran untuk pengembangan kapasitas bagi Personil Satpol PP dan Satlinmas;
7. Terbatasnya anggaran sosialisasi terhadap Perda dan Perkada;
8. Terbatasnya informasi terkait Perda dan Perkada;
9. Kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat dan pelaku usaha terhadap Perda dan Perkada;
10. Terbatasnya Sarana Prasarana dari segi kuantitas maupun kualitas pada Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka mendukung pelaksanaan operasional kegiatan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

Permasalahan-permasalahan tersebut menjadi **isu strategis utama dalam penyusunan Renja Perubahan Tahun 2025**, yang menuntut penyesuaian program, kegiatan, dan pengalokasian sumber daya secara lebih adaptif, efisien, dan responsif. Dokumen perubahan ini menjadi instrumen penting untuk menjawab tantangan kinerja pelayanan di lapangan sekaligus memperkuat peran Satpol PP sebagai garda depan ketenteraman dan ketertiban daerah.

Dari berbagai permasalahan yang ada dapat dilihat pada pemetaan permasalahan dalam memfasilitasi sasaran pembangunan daerah sebagai berikut;

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1	Belum optimalnya penanganan gangguan keamanan dan ketertiban umum	Belum optimalnya pencegahan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat melalui deteksi dini dan cegah dini dan koordinasi penyelenggaraan ketertiban umum	Belum terjalinnya sinergitas yang intensif dengan Perangkat Daerah dan Aparat keamanan di Wilayah terkait permasalahan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
		dan ketentraman masyarakat.	
		Belum optimalnya penindakan atas gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum.	Kurangnya personil Satpol PP dalam rangka penegakan PERDA dan PERKADA yang tidak sesuai dengan luas wilayah Kabupaten Tangerang atau belum memenuhi standar minimal kebutuhan personil yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja
			Belum adanya sinergitas penyelesaian/tindaklanjut pasca penindakan/penertiban ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
2	Belum optimalnya penanganan kejadian sosial kemasyarakatan dan kebencanaan	Belum optimalnya pemberdayaan Satlinmas dalam penanganan keamanan dan ketertiban umum	Kurangnya koordinasi dan pemahaman Kepala Desa terkait keanggotaan Satlinmas sehingga apabila berganti kepemimpinan, keanggotaan Satlinmas kembali berubah-ubah.
3	Kapasitas dan Kuantitas SDM Satpol PP, Satlinmas, dan PPNS yang masih perlu ditingkatkan	Belum optimalnya jumlah Personil PPNS	SDM di Satpol PP banyak yang tidak memenuhi kualifikasi sebagai PPNS
		Belum optimalnya pengembangan kapasitas bagi Personil Satpol PP dan Satlinmas	Terbatasnya anggaran untuk pengembangan kapasitas bagi Personil Satpol PP dan Satlinmas
4	Belum optimalnya penegakan Perda dan Perkada	Belum optimalnya sosialisasi Perda dan Perkada	Terbatasnya anggaran sosialisasi terhadap Perda dan Perkada
			Terbatasnya informasi terkait Perda dan Perkada
			Kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat dan pelaku usaha terhadap Perda dan Perkada

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
5	Belum Optimalnya Sarana dan Prasarana	Belum Optimalnya Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Penunjang Administrasi Perkantoran	Terbatasnya Sarana Prasarana dari segi kuantitas maupun kualitas pada Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka mendukung pelaksanaan operasional kegiatan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut di atas, akan dilakukan:

1. Mengoptimalkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang ada melalui kerjasama berupa Bimbingan Teknis dan Diklat Kompetensi dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Tangerang, Provinsi Banten dan Kementerian Dalam Negeri;
2. Meningkatkan profesionalisme melalui Pendidikan dan pelatihan teknis tertentu kepada Jabatan Fungsional (Polisi Pamong Praja);
3. Optimalisasi pemanfaatan teknologi dalam penyebarluasan informasi dan sosialisasi terhadap Perda dan Perkada melalui media sosial serta dalam penegakan Perda, Perkada dan Penanganan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Wilayah Kabupaten Tangerang;
4. Merumuskan Ratio kebutuhan SDM Polisi Pamong Praja dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) melalui Analisis Beban Kerja (ABK) dan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) sesuai dengan kompetensi dalam Penegakan Perda;
5. Mengoptimalkan anggaran yang tersedia seefektif dan seefisien mungkin dalam rangka peningkatan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tangerang;
6. Optimalisasi pemberdayaan satlinmas dalam deteksi dini dan cegah dini serta dalam penanganan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Berdasarkan analisis kinerja di atas, dapat disimpulkan bahwa Satpol PP Kabupaten Tangerang telah menunjukkan peningkatan dalam beberapa aspek kinerja pelayanan, namun masih ada area yang memerlukan perhatian dan perbaikan lebih lanjut. Rekomendasi untuk perbaikan meliputi peningkatan koordinasi antar instansi, pengembangan kapasitas SDM, pemanfaatan teknologi yang lebih

luas, dan peningkatan efektivitas penegakan Perda serta pengelolaan ketertiban umum. Dengan langkah-langkah perbaikan ini, diharapkan kinerja pelayanan Satpol PP dapat semakin optimal dan memenuhi harapan masyarakat.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Perubahan

Analisis kebutuhan terhadap Rancangan Awal RKPD Perubahan Tahun 2025 dilakukan sebagai bagian dari upaya menyelaraskan antara perencanaan program dan kegiatan dengan kondisi riil serta kebutuhan faktual perangkat daerah, khususnya Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tangerang. Proses ini menjadi penting untuk memastikan bahwa arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah tetap relevan, terukur, dan berbasis pada kebutuhan aktual di lapangan.

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa Rancangan Awal RKPD Perubahan Tahun 2025 secara umum telah mengakomodasi kebutuhan strategis Satuan Polisi Pamong Praja. Program dan kegiatan yang direncanakan mencerminkan kesinambungan dengan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024–2026 serta mendukung pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.

Meskipun demikian, terdapat beberapa kebutuhan yang belum dapat sepenuhnya terakomodasi dalam rancangan awal, khususnya terkait **pengadaan kendaraan operasional**. Hal ini disebabkan oleh adanya **penyesuaian prioritas anggaran di Tahun 2024**, di mana sebagian besar alokasi difokuskan pada kegiatan pengamanan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada. Oleh karena itu, kebutuhan pengadaan kendaraan dinas direncanakan untuk dialokasikan pada tahun-tahun berikutnya sesuai dengan roadmap kebutuhan yang telah disusun dalam dokumen RPD Kabupaten Tangerang Tahun 2024–2026 dan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja.

Selain itu, usulan kegiatan tambahan dan pergeseran anggaran yang diajukan dalam rangka RKPD Perubahan telah melalui proses telaah dan disesuaikan dengan kapasitas fiskal daerah. Hasil analisis kebutuhan ini juga telah disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sebagai bagian dari masukan teknokratis dalam proses perumusan Rancangan Awal RKPD Perubahan Tahun 2025.

Secara keseluruhan, hasil analisis ini menunjukkan bahwa proses perencanaan perubahan telah dilakukan secara partisipatif, terukur, dan berbasis data, serta tetap mempertimbangkan fleksibilitas dalam menghadapi dinamika kebutuhan dan tantangan di lapangan.

Tabel 2.4
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Perubahan Tahun 2025
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tangerang

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rancangan Awal RKPD Perubahan			Hasil Analisis Kebutuhan			SUMBER DANA
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	LOKASI	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	LOKASI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA			**36.665.895.158,00**			**36.665.895.158,00**		
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**36.665.895.158,00**			**36.665.895.158,00**		
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**			**36.665.895.158,00**			**36.665.895.158,00**		
1,	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan**	**100 Persen**	**31.093.405.358,00**		**100 Persen**	**31.093.405.358,00**		
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	7 Dokumen	526.574.375,00		7 Dokumen	526.574.375,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rancangan Awal RKPD Perubahan			Hasil Analisis Kebutuhan			SUMBER DANA
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	LOKASI	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	LOKASI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	219.240.425,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Dokumen	219.240.425,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	36.660.000,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	36.660.000,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.05.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD								
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	6.660.000,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	6.660.000,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.05.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD								

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rancangan Awal RKPD Perubahan			Hasil Analisis Kebutuhan			SUMBER DANA
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	LOKASI	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	LOKASI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	4.348.000,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	4.348.000,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.05.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD								
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	4.348.000,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	4.348.000,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	4.894.300,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	4.894.300,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rancangan Awal RKPD Perubahan			Hasil Analisis Kebutuhan			SUMBER DANA
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	LOKASI	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	LOKASI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	250.423.650,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6 Laporan	250.423.650,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan*	3 Dokumen	19.215.944.317,00		3 Dokumen	19.215.944.317,00		
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	127 Orang/ bulan	19.081.573.367,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	127 Orang/ bulan	19.081.573.367,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rancangan Awal RKPD Perubahan			Hasil Analisis Kebutuhan			SUMBER DANA
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	LOKASI	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	LOKASI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	37.729.850,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	37.729.850,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD								
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6 Laporan	96.641.100,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6 Laporan	96.641.100,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Pembinaan Pegawai*	3 Dokumen	593.360.000,00		3 Dokumen	593.360.000,00		
	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya								

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rancangan Awal RKPD Perubahan			Hasil Analisis Kebutuhan			SUMBER DANA
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	LOKASI	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	LOKASI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	593.360.000,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	593.360.000,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.05.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian								
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	0 Dokumen	0,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 Dokumen	0,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.05.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi								
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang	0,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 Orang	0,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rancangan Awal RKPD Perubahan			Hasil Analisis Kebutuhan			SUMBER DANA
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	LOKASI	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	LOKASI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah*	8 Dokumen	2.189.727.050,00		8 Dokumen	2.189.727.050,00		
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	47.737.500,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	47.737.500,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.015.143.100,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	1.015.143.100,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rancangan Awal RKPD Perubahan			Hasil Analisis Kebutuhan			SUMBER DANA
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	LOKASI	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	LOKASI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	106.879.900,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	106.879.900,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	87.439.500,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	87.439.500,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	185.302.050,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	185.302.050,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rancangan Awal RKPD Perubahan			Hasil Analisis Kebutuhan			SUMBER DANA
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	LOKASI	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	LOKASI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	152.640.000,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Dokumen	152.640.000,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu								
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	376.170.000,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Laporan	376.170.000,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	218.415.000,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	218.415.000,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rancangan Awal RKPD Perubahan			Hasil Analisis Kebutuhan			SUMBER DANA
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	LOKASI	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	LOKASI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah*	0 Dokumen	0,00		0 Dokumen	0,00		
	1.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	0,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 Unit	0,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Dokumen Jasa Penunjang*	3 Dokumen	6.783.355.568,00		3 Dokumen	6.783.355.568,00		
	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rancangan Awal RKPD Perubahan			Hasil Analisis Kebutuhan			SUMBER DANA
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	LOKASI	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	LOKASI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	15.000.000,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	15.000.000,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	46.800.000,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	46.800.000,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	6.721.555.568,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	6.721.555.568,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rancangan Awal RKPD Perubahan			Hasil Analisis Kebutuhan			SUMBER DANA
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	LOKASI	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	LOKASI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	4 Dokumen	1.784.444.048,00		4 Dokumen	1.784.444.048,00		
	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	57 Unit	923.490.048,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	57 Unit	923.490.048,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	57 Unit	445.054.000,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	57 Unit	445.054.000,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rancangan Awal RKPD Perubahan			Hasil Analisis Kebutuhan			SUMBER DANA
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	LOKASI	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	LOKASI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	86 Unit	101.500.000,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	86 Unit	101.500.000,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	314.400.000,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	314.400.000,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2,	**1.05.02**	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Penanganan gangguan Ketentraman dan ketertiban umum Persentase Linmas yang terlatih**	**100 11 Persen Persen**	**5.572.489.800,00**		**100 11 Persen Persen**	**5.572.489.800,00**		
	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat* *Jumlah Laporan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum* *Jumlah Laporan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat*	2 Dokumen 3 Dokumen 4 Dokumen	5.202.469.200,00		2 Dokumen 3 Dokumen 4 Dokumen	5.202.469.200,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rancangan Awal RKPD Perubahan			Hasil Analisis Kebutuhan			SUMBER DANA
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	LOKASI	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	LOKASI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1.05.02.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota								
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	856.960.550,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	856.960.550,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum								
			Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen	116.580.000,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	116.580.000,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.05.02.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia								
			Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	266 Orang	604.363.650,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	266 Orang	604.363.650,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.05.02.2.01.0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum								

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rancangan Awal RKPD Perubahan			Hasil Analisis Kebutuhan			SUMBER DANA
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	LOKASI	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	LOKASI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	1 Dokumen	37.927.450,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	37.927.450,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.05.02.2.01.0008	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat								
			Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	1 Dokumen	131.305.150,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	131.305.150,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan								
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	302 laporan	1.612.357.000,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	302 laporan	1.612.357.000,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.05.02.2.01.0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa								

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rancangan Awal RKPD Perubahan			Hasil Analisis Kebutuhan			SUMBER DANA
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	LOKASI	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	LOKASI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	52 Laporan	844.864.400,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	52 Laporan	844.864.400,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.05.02.2.01.0017	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah								
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	1 Laporan	25.000.000,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	25.000.000,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.05.02.2.01.0018	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum								
			Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	289 Unit	973.111.000,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	289 Unit	973.111.000,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rancangan Awal RKPD Perubahan			Hasil Analisis Kebutuhan			SUMBER DANA
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	LOKASI	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	LOKASI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	*Jumlah Dokumen Penegakan Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti*	3 Dokumen	222.350.150,00		3 Dokumen	222.350.150,00		
	1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah								
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1 Laporan	44.709.850,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	44.709.850,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah								
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	1 Laporan	47.840.100,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	47.840.100,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.05.02.2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah								

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rancangan Awal RKPD Perubahan			Hasil Analisis Kebutuhan			SUMBER DANA
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	LOKASI	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	LOKASI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1 Laporan	129.800.200,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	129.800.200,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Peningkatan Kapasitas PPNS*	1 Laporan	147.670.450,00		1 Laporan	147.670.450,00		
	1.05.02.2.03.0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS								
			Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	1 Laporan	147.670.450,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	147.670.450,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	J U M L A H				**36.665.895.158,00**			**36.665.895.158,00**		

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Sebagai bagian dari proses perencanaan partisipatif, pelaksanaan **Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)** tingkat kelurahan/desa dan kecamatan Tahun 2024 untuk perencanaan Tahun Anggaran 2025 telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan jadwal yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Kegiatan ini bertujuan untuk menampung aspirasi masyarakat dalam merumuskan kebutuhan program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah.

Namun demikian, berdasarkan hasil penelaahan terhadap seluruh usulan yang masuk melalui forum Musrenbang dan mekanisme e-Musrenbang SIPD, **Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tangerang tidak menerima usulan program maupun kegiatan dari masyarakat maupun pemangku kepentingan (stakeholders)** untuk Tahun Anggaran 2025. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

- **Masih terbatasnya pemahaman masyarakat terhadap tugas dan fungsi Satpol PP** sebagai instansi penegak Perda dan penyelenggara ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- **Fokus masyarakat dalam Musrenbang lebih tertuju pada sektor infrastruktur fisik, pendidikan, dan kesehatan** yang dianggap lebih langsung dirasakan manfaatnya;
- **Keterbatasan sosialisasi program-program strategis Satpol PP** yang bersifat non-fisik namun berdampak penting terhadap stabilitas dan kenyamanan lingkungan sosial.

Seiring dengan penyusunan **Renja Perubahan Tahun 2025**, Satpol PP Kabupaten Tangerang akan terus mendorong pendekatan kolaboratif dan promotif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam merumuskan program ketenteraman dan ketertiban umum. Upaya ini dilakukan melalui:

- **Penguatan komunikasi publik berbasis komunitas**, khususnya untuk kegiatan sosialisasi Perda dan pembinaan Satlinmas;
- **Keterlibatan aktif dalam forum Musrenbang mendatang**, termasuk menyampaikan edukasi kepada masyarakat terkait urgensi ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sebagai bagian dari pembangunan daerah;
- **Integrasi usulan masyarakat dalam kegiatan preventif**, seperti patroli keamanan lingkungan, penyuluhan ketertiban umum, dan forum koordinasi trantibum.

Dengan pendekatan tersebut, diharapkan usulan kegiatan dari masyarakat pada tahun-tahun berikutnya dapat mencerminkan kepedulian dan sinergi yang lebih baik antara masyarakat dan Satpol PP, guna menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan harmonis

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN TANGERANG

3.1 Rencana Kera dan Pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tangerang

Kedudukan Rencana Kerja adalah sebagai kerangka dasar dalam melaksanakan operasional tugas pokok dan fungsi organisasi. Dalam rangka mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tangerang, serta untuk melaksanakan strategi dan kebijakan melalui beberapa program dan kegiatan. Adapun Program dan Kegiatan pada tahun 2025 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tangerang berpedomanan pada nomenklatur Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenlatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dimana terdapat pemutakhiran yang belum dilakukan penyesuaiannya terhadap Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) 2024-2026 sehingga menyebabkan adanya perbedaan Indikator pada Dokumen Rencana Kerja (RENJA 2025) dan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

TABEL 3.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Kebutuhan Dana Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tangerang Tahun 2025

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
						SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH	
	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA							**35.772.331.780,00**	**37.063.200.873,00**	**36.665.895.158,00**	**893.563.378,00**					
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**35.772.331.780,00**	**37.063.200.873,00**	**36.665.895.158,00**	**893.563.378,00**					
1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**35.772.331.780,00**	**37.063.200.873,00**	**36.665.895.158,00**	**893.563.378,00**					
1.05.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan**				**100 Persen**	**100 Persen**	**29.276.139.580,00**	**30.271.416.273,00**	**31.093.405.358,00**	**2.700.908.400,00**					
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				7 Dokumen	7 Dokumen	834.923.500,00	690.437.150,00	526.574.375,00	-308.349.125,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Internal Satpol PP Kabupaten Tangerang
1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	484.229.250,00	292.362.100,00	219.240.425,00	-264.988.825,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	
1.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD															

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
						SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH	
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	122.034.800,00	39.380.000,00	36.660.000,00	-85.374.800,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	
1.05.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD															
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	88.977.800,00	9.380.000,00	6.660.000,00	-82.317.800,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	
1.05.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD															
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.782.000,00	6.125.000,00	4.348.000,00	-1.434.000,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	
1.05.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD															
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.782.000,00	6.125.000,00	4.348.000,00	-1.434.000,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	
1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD															

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
						SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH	
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	1 Laporan	6.825.500,00	6.919.000,00	4.894.300,00	-1.931.200,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	
1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	6 Laporan	121.292.150,00	330.146.050,00	250.423.650,00	129.131.500,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan*				3 Dokumen	3 Dokumen	18.048.886.980,00	18.525.253.457,00	19.215.944.317,00	1.167.057.337,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Internal Satpol PP Kabupaten Tangerang
1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN															
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				71 Orang/bulan	127 Orang/bulan	17.772.331.780,00	18.350.610.507,00	19.081.573.367,00	1.309.241.587,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	
1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD															

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
						SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH	
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	111.170.000,00	48.849.850,00	37.729.850,00	-73.440.150,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	
1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD															
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				6 Laporan	6 Laporan	165.385.200,00	125.793.100,00	96.641.100,00	-68.744.100,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Pembinaan Pegawai*				3 Dokumen	3 Dokumen	829.927.600,00	593.360.000,00	593.360.000,00	-236.567.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Internal Satpol PP Kabupaten Tangerang
1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya															

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
						SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH	
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	611.987.600,00	593.360.000,00	593.360.000,00	-18.627.600,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	
1.05.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian															
		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	108.000.000,00	0,00	0,00	-108.000.000,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	
1.05.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi															
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	5 Orang	109.940.000,00	0,00	0,00	-109.940.000,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
						SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH	
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah*				8 Dokumen	8 Dokumen	1.592.621.900,00	2.345.266.050,00	2.189.727.050,00	597.105.150,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Internal Satpol PP Kabupaten Tangerang
1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor															
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	47.747.600,00	47.737.500,00	47.737.500,00	-10.100,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	
1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor															
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	469.053.900,00	1.015.143.100,00	1.015.143.100,00	546.089.200,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	
1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga															

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
						SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	106.879.900,00	106.879.900,00	106.879.900,00	0,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	
1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor															
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	87.439.500,00	87.439.500,00	87.439.500,00	0,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	
1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan															
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	90.673.000,00	217.251.050,00	185.302.050,00	94.629.050,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	
1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan															

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
						SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH	
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				4 Dokumen	4 Dokumen	47.328.000,00	152.640.000,00	152.640.000,00	105.312.000,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	
1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu															
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				4 Laporan	4 Laporan	268.200.000,00	285.960.000,00	376.170.000,00	107.970.000,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	
1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD															
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	475.300.000,00	432.215.000,00	218.415.000,00	-256.885.000,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
						SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH	
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah*				1 Dokumen	1 Dokumen	444.439.900,00	0,00	0,00	-444.439.900,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Internal Satpol PP Kabupaten Tangerang
1.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan															
		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				8 Unit	8 Unit	444.439.900,00	0,00	0,00	-444.439.900,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Dokumen Jasa Penunjang*				3 Dokumen	3 Dokumen	5.788.762.000,00	6.332.655.568,00	6.783.355.568,00	994.593.568,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Internal Satpol PP Kabupaten Tangerang
1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat															

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
						SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	
1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik															
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	46.800.000,00	46.800.000,00	46.800.000,00	0,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	
1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor															
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	5.726.962.000,00	6.270.855.568,00	6.721.555.568,00	994.593.568,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
						SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH	
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				4 Dokumen	4 Dokumen	1.736.577.700,00	1.784.444.048,00	1.784.444.048,00	47.866.348,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Internal Satpol PP Kabupaten Tangerang
1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan															
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				65 Unit	57 Unit	1.044.902.700,00	923.490.048,00	923.490.048,00	-121.412.652,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	
1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan															
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				65 Unit	57 Unit	393.675.000,00	445.054.000,00	445.054.000,00	51.379.000,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	
1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya															

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
						SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6 Unit	86 Unit	101.500.000,00	101.500.000,00	101.500.000,00	0,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	
1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya															
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	196.500.000,00	314.400.000,00	314.400.000,00	117.900.000,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	
1.05.02	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Penanganan gangguan Ketentraman dan ketertiban umum Persentase Linmas yang terlatih**				**-**	**100 11 Persen Persen**	**6.496.192.200,00**	**6.791.784.600,00**	**5.572.489.800,00**	**4.971.471.200,00**					
1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat Jumlah Laporan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Jumlah Laporan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat*				-	2 Dokumen 3 Dokumen 4 Dokumen	5.753.290.850,00	6.210.435.200,00	5.202.469.200,00	-550.821.650,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintah n yang Baik	Internal Satpol PP dan Masyarakat Kabupaten Tangerang
1.05.02.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota															

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
						SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH	
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	1.200.037.100,00	1.332.620.550,00	856.960.550,00	-343.076.550,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	
1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum															
		Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum				1 Dokumen	1 Dokumen	199.990.000,00	199.990.000,00	116.580.000,00	-83.410.000,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	
1.05.02.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia															
		Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				385 Orang	266 Orang	846.999.550,00	787.485.650,00	604.363.650,00	-242.635.900,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	
1.05.02.2.01.0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum															

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	
						SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan				1 Dokumen	1 Dokumen	83.987.450,00	55.787.450,00	37.927.450,00	-46.060.000,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	
1.05.02.2.01.0008	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat														
		Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan				1 Dokumen	1 Dokumen	181.805.150,00	164.365.150,00	131.305.150,00	-50.500.000,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	
1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan														
		Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan				385 laporan	302 laporan	1.794.990.000,00	1.750.755.000,00	1.612.357.000,00	-182.633.000,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	
1.05.02.2.01.0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa														

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
						SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH	
		Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan				83 Laporan	52 Laporan	919.545.600,00	919.530.400,00	844.864.400,00	-74.681.200,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	
1.05.02.2.01.0017	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah															
		Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani				1 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	
1.05.02.2.01.0018	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum															
		Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia				360 Unit	289 Unit	500.936.000,00	974.901.000,00	973.111.000,00	472.175.000,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
						SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH	
1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	*Jumlah Dokumen Penegakan Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti*				3 Dokumen	3 Dokumen	451.340.900,00	381.580.950,00	222.350.150,00	-228.990.750,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Internal Satpol PP dan Masyarakat Kabupaten Tangerang
1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah															
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				1 Laporan	1 Laporan	130.840.650,00	61.080.650,00	44.709.850,00	-86.130.800,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	
1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah															
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP				1 Laporan	1 Laporan	59.500.050,00	59.500.100,00	47.840.100,00	-11.659.950,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	
1.05.02.2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah															

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN
						TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	
						SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				2 Laporan	1 Laporan	261.000.200,00	261.000.200,00	129.800.200,00	-131.200.000,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	
1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Peningkatan Kapasitas PPNS*				1 Laporan	1 Laporan	291.560.450,00	199.768.450,00	147.670.450,00	-143.890.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten Tangerang
1.05.02.2.03.0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS														
		Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda				1 Laporan	1 Laporan	291.560.450,00	199.768.450,00	147.670.450,00	-143.890.000,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	
J U M L A H								**35.772.331.780,00**	**37.063.200.873,00**	**36.665.895.158,00**	**1.284.717.462.164,00**					

BAB IV
PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tangerang disusun sebagai penyesuaian terhadap dinamika pembangunan daerah, hasil evaluasi kinerja, serta perubahan kebijakan, kebutuhan, dan prioritas pembangunan yang berkembang selama tahun berjalan. Dokumen ini mencerminkan upaya nyata Satpol PP dalam mendukung visi pembangunan Kabupaten Tangerang, khususnya dalam mewujudkan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat yang profesional, responsif, serta humanis.

Secara umum, program dan kegiatan yang dirumuskan telah mengakomodasi hasil analisis kebutuhan, hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja sebelumnya, dan integrasi terhadap kebijakan nasional, provinsi, maupun kabupaten. Meskipun terdapat beberapa kebutuhan yang belum seluruhnya dapat terakomodasi, seperti pengadaan sarana prasarana operasional, namun arah kebijakan dan strategi pelaksanaan kegiatan tetap disesuaikan agar capaian kinerja tetap optimal.

4.2 Saran

1. **Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi**
   Diperlukan koordinasi lebih lanjut antar perangkat daerah dan dengan Pemerintah Pusat/Provinsi untuk memastikan kesinambungan program, efektivitas pelaksanaan kegiatan, serta dukungan terhadap kebutuhan prioritas Satpol PP.
2. **Penguatan Kapasitas dan Sumber Daya**
   Perlu dilakukan penguatan kapasitas kelembagaan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan teknis, diklat intelijen, serta kegiatan pengembangan lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi yang semakin kompleks.
3. **Pemenuhan Sarana Prasarana Penunjang Operasional**
   Pemenuhan kebutuhan kendaraan operasional dan peralatan pengamanan perlu menjadi perhatian dalam perencanaan tahun berjalan dan tahun berikutnya, mengingat peran strategis Satpol PP dalam penegakan perda dan perlindungan masyarakat.
4. **Peningkatan Partisipasi dan Edukasi Publik**
   Upaya edukasi dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat hendaknya ditingkatkan melalui pendekatan yang partisipatif, sosialisasi, serta sinergi dengan tokoh masyarakat dan kelembagaan desa/kelurahan.

Dengan adanya dokumen ini, diharapkan perencanaan perubahan tahun 2025 dapat menjadi pedoman yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta mampu mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

15. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja selanjutnya disebut Renja merupakan acuan setiap perangkat daerah dalam mengoperasionalkan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi jangka menengah daerah. Dengan rencana kerja yang terukur dan didukung oleh pendanaan, maka menjadi suatu instrumen dan indikator yang digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah.

Penyusunan Renja Perubahan berpedoman pada Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik dan mengacu pada rencana kerja pemerintah daerah (RKPD). Penyusunan Renja bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD. Renja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik merupakan bagian yang utuh dari rencana pembangunan daerah (RPD) dan rencana strategis (RENSTRA) Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik. Keduanya merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik, dengan demikian program dan kegiatan pembangunan yang ada pada dokumen perencanaan diatur secara rinci dalam Renja.

Renja Perubahan -OPD merupakan penjabaran dari kegiatan yang terdapat di dalam Organisasi Perangkat Daerah dengan mengacu pada Tupoksi OPD yang telah ditetapkan dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tangerang mengacu pada Peraturan Bupati Tangerang nomor : 41 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tangerang.

1.2. Landasan Hukum

a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
b. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
d. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
e. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik;
f. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial;

g. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan;
h. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Daerah;
i. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
j. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
k. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan;
l. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
m. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
n. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
o. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
p. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM);
q. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
r. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
s. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
t. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
u. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, Nomor : 9 dan
8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/WakilKepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat;
v. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pembauran Kebangsaan Di Daerah;
w. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik;
x. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2010 Tentang Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing Di Daerah;
y. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2010 Tentang Pemantauan Tenaga Kerja Asing Di Daerah;
z. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemerintah Daerah Dalam Rangka Revitalisasi Dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila;
aa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Pedoman Peningkatan Kesadaran Bela Negara Di Daerah;
bb. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012

Tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan;

cc. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik;

dd. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika;

ee. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

ff. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, beserta Pemutakhirannya melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050- 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

gg. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

hh. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

ii. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

jj. Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental;

kk. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru;

ll. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025;

mm. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten 2010-2030;

nn. Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2023-2026;

oo. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2005-2025;

pp. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang Tahun 2011-2031;

qq. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2005-2025;
rr. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang;
ss. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 41 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Tangerang.
tt. Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tangerang Tahun 2024 – 2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Tangerang Tahun 2025, bertujuan untuk menunjukan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan pembangunan dari berbagai kegiatan, serta mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya pembangunan daerah. Renja disusun sebagai pedoman yang terdiri dari:

a. Penyusunan kebijakan anggaran, program dan kegiatan Tahun 2025;
b. Sebagai acuan Badan Kesbangpol dalam melaksanakan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Kesbangpol;
c. Pelaksanaan program dan kegiatan yang ada di Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik;
d. Sebagai alat kontrol organisasi dalam mengendalikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan tahunan;
e. Sebagai acuan dalam melaksanakan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.

1.4. Sistematika Penulisan

RENJA Perubahan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Tangerang tahun 2025 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan Rancangan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang.

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN SKPD TAHUN LALU

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TANGERANG

Pada Bab ini bersisi tantang Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan tahun 2025

BAB IV PENUTUP

Berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tangerang disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman atau tindak lanjut tahapan perencanaan tahun berikutnya yang dilaksanakan oleh Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tangerang.

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan. Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Kinerja sendiri merupakan keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

Pengukuran Laporan Kinerja dilakukan dengan menggunakan konsep Value For Money Penggunaan konsep dimaksud memerlukan indikator-indikator sebagai berikut :

a. Indikator Masukan (Input), untuk mengukur jumlah sumberdaya seperti anggaran (dana), SDM, peralatan, material, dan masukan lainnya untuk melakukan suatu kegiatan. Dengan meninjau distribusi sumberdaya dapat dianalisis apakah alokasi sumberdaya yang dimiliki telah sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan.
b. lndikator Keluaran (Output), merupakan indikator yang diharapkan langsung dicapaI dari suatu kegiatan, baik berupa fisik maupun berupa non fisik.
c. lndikator Hasil (Outcome), merupakan indikator yang menunjukkan telah dicapainya maksud dan tujuan dari kegiatan - kegiatan yang telah selesai dilaksanakan atau indikator yang mencerminan berfungsinya keluaran pada jangka menengah. Sedangkan Laporan Keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban keuangan yang berbentuk laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Kegiatan hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tangerang ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tangerang dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra SKPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Review didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun sebelumnya dan perkiraan pelaksanaan DPA-SKPD (dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah) tahun berjalan yang baru disahkan.

Keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2025 ditentukan dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan Renja Tahun yang bersangkutan dan APBD Kabupaten Tangerang. Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan atau yang telah direalisasikan sesuai dengan pagu anggaran yang ditetapkan pada tahun 2025 adalah :

Program kegiatan yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2025 setelah APBD Tahun 2025 sebanyak 2 Program, 17 Kegiatan dan 50 Sub Kegiatan, yang terdiri dari program SKPD sebanyak 1 Program ,7 Kegiatan dan 23 Sub Kegiatan , serta program Wajib Pilihan sebanyak 1 Program, 10

Kegiatan dan 27 Sub Kegiatan Adapun Anggaran dan realisasi program kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel-tabel berikut :

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tangerang pada Tahun Anggaran 2025 mendapatkan pagu Anggaran sebesar Rp 118.795.778.333, Rincian Anggaran Belanja Operasi Senilai Rp 117.353.871.909 dan belanja Modal Rp 918.141.300.

Penyerapan Anggaran sampai dengan Akhir Tahun 2025 telah terserap Rp 115.628.531.201 atau 97,33 % dari APBD Tahun 2025, Adapun beberapa kegiatan fisik dan pengadaan barang serta konsultansi dilaksanakan pada Akhir Tahun 2025.

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Tahun 2025 dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Badan tahun 2024 Kabupaten Tangerang

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM / KEGIATAN	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Capaian (%)	Realisasi Fisik Kegiatan (%)	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Satuan	Target indikator	Realisasi Indikator	Capaian (%)
1	2	3	4	5=(4/3)*100	6	7	8	9	10	11=(10/9)*100
xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx
08:01	URUSAN PEMERINTAHAN UMUM BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	118.795.778.333	115.628.531.201	97,33	100,00					
8.01.0.00.0.00.02.0000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	118.795.778.333	115.628.531.201	97,33	100,00					
08:01:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.904.192.029	12.397.988.224	96,08	100,00	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan	% (Persen)	100,00	100,00	100,00
8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	861.344.270	837.062.000	97,18	100,00	Persentase Ketersediaan Dokumen perencanaan dan Pelaporan	% (Persen)	100,00	100,00	100,00
8.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	210.662.000	206.512.000	98,03	100,00	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	2	100,00
8.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	220.482.270	203.259.000	92,19	100,00	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	2	100,00
8.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	430.200.000	427.291.000	99,32	100,00	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	2	2	100,00
8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.993.818.959	5.843.082.912	97,49	100,00	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	% (Persen)	100	100,00	100,00
8.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.763.043.759	5.612.715.712	97,39	100,00	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	51	51	100,00
8.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	230.775.200	230.367.200	99,82	100,00	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	2	2	100,00
8.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	131.940.000	131.940.000	100,00	100,00	Persentase Ketersediaan Dokumen Laporan Barang Milik Daerah	% (Persen)	100	100,00	100,00
8.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	131.940.000	131.940.000	100,00	100,00	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	2	2	100,00
8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	816.064.000	755.109.350	92,53	100,00	Persentase aparatur yang meningkat kapasitasnya	% (Persen)	100	100,00	100,00
8.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	683.643.400	660.687.000	96,64	100,00	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	3	3	100,00
8.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	132.420.600	94.422.350	71,30	76	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	51	51	100,00
8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.067.490.900	2.897.869.579	94,47	100,00	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	% (Persen)	100	100,00	100,00
8.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0	0	0,00	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	10	10,00	100,00
8.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	972.853.200	893.576.439	91,85	100,00	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	10	10	100
8.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	47.834.600	47.834.600	100,00	100,00	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	10	10	100,00
8.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	164.264.900	142.996.900	87,05	100,00	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	4	100,00
8.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	104.839.200	103.349.200	98,58	100,00	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	100,00
8.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	50.000.000	50.000.000	100,00	100,00	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	1	100,00
8.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	126.600.000	126.600.000	100,00	100,00	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	1	100,00
8.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.529.459.000	1.461.874.000	95,58	100,00	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	2	2	100,00
8.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	71.640.000	71.638.440	100,00	100,00	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	2	2	100,00
8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0	0,00	0	Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah	% (Persen)	100	0,00	0,00
8.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0	0	0,00	0	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	5	0	0,00
8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	625.018.800	614.974.800	98,39	100,00	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% (Persen)	100	100,00	100,00
8.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	103.920.000	97.440.000	93,76	100,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1	100,00
8.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0	0	0,00	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	0	0,00
8.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	521.098.800	517.534.800	99,32	100,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	100,00
8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.408.515.100	1.317.949.583	93,57	100,00	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	% (Persen)	100	100,00	100,00
8.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	217.209.000	183.806.088	84,62	100,00	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	5	5	100,00
8.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	132.003.600	98.385.135	74,53	79,53	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	5	4	80,00
8.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	73.000.000	73.000.000	100,00	100,00	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	40	40	100,00
8.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	986.302.500	962.758.360	97,61	100,00	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	100,00
08:01:02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	11.318.089.898	11.065.325.413	97,77	100,00	Persentase Capaian Efektifitas Penguatan nilai-nilai pancasila, wawasan kebangsaan, dan karakter bangsa	% (Persen)	0,9	0,90	100,00
8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	11.318.089.898	11.065.325.413	97,77	100,00	Persentase Pemenuhan Fasiltiasi Rumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	% (Persen)	100	100,00	100,00
8.01.02.2.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	18.000.000	17.000.000	94,44	100,00	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	Dokumen	2	2	100,00
8.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	7.352.966.498	7.235.973.013	98,41	100,00	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka	Orang	2000	2000	100,00

						Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				
8.01.02.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	155.218.000	137.218.000	**88,40**	**100,00**	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	**Orang**	**200**	**200**	**100,00**
8.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	21.000.000	21.000.000	**100,00**	**100,00**	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	**Laporan**	**2**	**2**	**100,00**
8.01.02.2.01.0006	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	1.568.359.000	1.530.843.000	**97,61**	**100,00**	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan KarakterKeluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	**Keluarga**	**7**	**7**	**100,00**
8.01.02.2.01.0007	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	24.356.000	6.089.000	**25,00**	**30,00**	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	**Dokumen**	**1**	**1**	**100,00**
8.01.02.2.01.0008	Pembentukan Paskibraka	1.719.992.400	1.688.678.400	**98,18**	**100,00**	Jumlah Paskibraka	**Orang**	**50**	**50**	**100,00**
8.01.02.2.01.0009	Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	410.260.000	410.026.000	**99,94**	**100,00**	Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	**Dokumen**	**1**	**1**	**100,00**
8.01.02.2.01.0010	Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	24.960.000	6.320.000	**25,32**	**30,32**	Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	**Dokumen**	**1**	**1**	**100,00**
8.01.02.2.01.0011	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	22.978.000	12.178.000	**53,00**	**58,00**	Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila	**Orang**	**50**	**50**	**100,00**
08:01:03	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	**86.868.763.166**	**85.438.636.964**	**98,35**	**100,00**	**Persentase Capaian Efektifitas Penguatan Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik**	% (Persen)	8,61	8,61	100,00
8.01.03.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik**	**86.868.763.166**	**85.438.636.964**	**98,35**	**100,00**	**Persentase Pemenuhan Fasilitasi Rumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik**	% (Persen)	100	50,00	50,00
8.01.03.2.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	14.000.000	13.880.000	99,14	100,00	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	**Dokumen**	**2**	**2**	**100,00**
8.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	85.120.891.266	83.786.659.064	98,43	100,00	Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	**Orang**	**700**	**700**	**100,00**
8.01.03.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	291.307.000	260.547.000	89,44	100,00	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	**Orang**	**200**	**200**	**100,00**
8.01.03.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1.442.564.900	1.377.550.900	95,49	100,00	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	**Laporan**	**2**	**2**	**100,00**
08:01:04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	**1.220.422.400**	**1.086.446.400**	**89,02**	**100,00**	**Persentase Capaian Efetifitas Pembinaan dan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan**	% (Persen)	14,29	14,29	100,00
8.01.04.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	**1.220.422.400**	**1.086.446.400**	**89,02**	**100,00**	**Persentase Pemenuhan Fasilitasi Rumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	% (Persen)	100	50,00	50,00
8.01.04.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	14.000.000	13.880.000	99,14	100,00	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	**Dokumen**	**2**	**2**	**100,00**
8.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1.081.663.800	984.347.800	91,00	100,00	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	**Orang**	**400**	**400**	**100,00**
8.01.04.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	103.758.600	70.338.600	67,79	72,79	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	**Orang**	**200**	**200**	**100,00**
8.01.04.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	21.000.000	17.880.000	85,14	100,00	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	**Laporan**	**2**	**2**	**100,00**
08:01:05	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	**2.642.030.000**	**2.354.811.000**	**89,13**	**100,00**	**Persentase Capaian Efektifitas Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya**	% (Persen)	0,91	0,91	100,00
8.01.05.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**	**2.642.030.000**	**2.354.811.000**	**89,13**	**100,00**	**Persentase Pemenuhan Fasilitasi Rumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**	% (Persen)	100	45,00	45,00
8.01.05.2.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	18.000.000	17.000.000	94,44	100,00	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	**Dokumen**	**2**	**2**	**100,00**
8.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas,	1.132.030.000	884.787.000	78,16	83,16	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan	**Orang**	**1000**	**1000**	**100,00**

	Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah					Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				
8.01.04.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1.471.000.000	1.432.024.000	97,35	100,00	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	**Orang**	**200**	**200**	**100,00**
8.01.04.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	21.000.000	21.000.000	100,00	100,00	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	**Laporan**	**2**	**2**	**100,00**
08:01:06	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	**3.842.280.840**	**3.285.323.200**	**85,50**	**100,00**	**Persentase Capaian Efektifitas Penyelenggaraan Kewaspadaan Nasional di Daerah**	% (Persen)	12,94	12,94	100,00
8.01.06.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**	**3.842.280.840**	**3.285.323.200**	**85,50**	**100,00**	**Persentase Pemenuhan Fasilitasi Rumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**	% (Persen)	100	40,00	40,00
8.01.06.2.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	18.000.000	17.880.000	99,33	100,00	Jumlah Dokumen ProgramKerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	**Dokumen**	**2**	**2**	**100,00**
8.01.06.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik Sosial	1.856.529.300	1.530.043.200	82,41	100,00	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	**Orang**	**200**	**200**	**100,00**
8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik Sosial	399.600.000	371.400.000	92,94	100,00	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	**Orang**	**200**	**200**	**100,00**
8.01.06.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	398.151.540	372.850.000	93,65	100,00	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	**Laporan**	**2**	**2**	**100,00**
8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	1.170.000.000	993.150.000	84,88	100,00	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	**Dokumen**	**1**	**1**	**100,00**

Terhadap hasil analisi Renja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Tahun 2024 hingga disampaikan hal-hal sebagai berikut :

a. Program/kegiatan yang belum memenuhi target kinerja hasil/keluaran Pada uraian ini terkait Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan pada Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan APBD TA. 2024 Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan serta Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial Pada Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik Sosial.pada yang dilaksanakan pada Triwulan IV.
Untuk Ruang lingkup kelompok Penguatan Bela Negara belum tercapai target kinerja hal tersebut dikarenakan kegiatan belum dilaksanakan karenakan jadwal masih pada akhir tahun.

b. Program/ kegiatan yang telah memenuhi/ melebihi target kinerja hasil/ keluaran
Pada uraian ini terkait Program/ kegiatan yang telah memenuhi/ melebihi target kinerja hasil/ keluaran dalam hal indikator kinerja pada program/ kegiatan adalah :

1. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya

Politik pada Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik ;

c. **Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Kesbangpol Kabupaten Tangerang adalah terdapat kegiatan dalam program renstra yang masih belum terpenuhi.**

2.2 Analisis Gambaran Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

Sesuai dengan dokumen Renstra Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026 yang telah disusun maka hubungan antara tujuan, sasaran serta indikatornya adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Indikator Sasaran		
				2024	2025	2026
1	**Mewujudkan lingkungan yang kondusif, aman, dan tertib**	**Meningkatnya Pencegahan potensi kerawanan konflik sosial**	**Persentase Pencegahan potensi kerawanan konflik**	**100**	**100**	**100**
2	**Meningkatkan kualitas manajemen dan penunjang teknis Badan Kesbangpol**	**Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Kesbangpol**	**Nilai AKIP Badan Kesbangpol**	**72**	**74**	**74**

Analisis kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Tangerang sesuai dengan Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik tertuang dalam capaian sasaran Strategis Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Kabupaten Tangerang

No.	Indikator Renstra	Target Indikator Sasaran					Proyeksi Realisasi Capaian	Proyeksi			Catatan Analisis
		2019	2020	2021	2022	2023	(2024)	2024	2025	2026	
1	**Mewujudkan lingkungan yang kondusif, aman, dan tertib**	**100 persen (%)**	**100 persen (%)**	**100 persen (%)**	**100 persen (%)**	**100 persen (%)**	**100 persen (%)**	**100 persen (%)**	**100 persen (%)**	**100 persen (%)**	**Jumlah kerawanan potensi konflik yang dapat dicegah dibagi Jumlah kerawanan potensi konflik x 100 %**
2	**Meningkatkan kualitas manajemen dan penunjang teknis Badan Kesbangpol**	**53 poin**	**65 poin**	**68 poin**	**70 poin**	**72 poin**	**72 poin**	**72 poin**	**74 poin**	**74 poin**	**Nilai AKIP Badan Kesbangpol**

Ada beberapa faktor yang merupakan pendorong keberhasilan dan beberapa faktor penghambat/ kendala dalam pelaksanaan atau perwujudan indikator sasaran organisasi, yaitu :

a. Faktor Pendorong

1. Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tangerang yang telah sesuai dengan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 41 Tahun 2022 Tentang Kedudukan , Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ;
2. Adanya hubungan kerja yang baik dan komitmen yang kuat antara pimpinan dan staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tangerang dalam menciptakan suasana kerja yang kondusif sehingga menimbulkan motivas kerja yang tinggi terhadap upaya peningkatan kualitas, pola kerja yang sistematik dan terjadwal sehingga memeberikan hasil yang optimal efektif dan efisien

b. Faktor Penghambat

1. Belum terpenuhinya kebutuhan sumber daya manusia (aparatur) yang memadai;
2. Belum optimalnya pastisipasi dan kerjasama stakeholder terkait;
3. Belum memadainya sarana dan prasarana pendukung operasional.

2.3 Isu-Isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tangerang tidak terlepas dari isu-isu strategis yang melingkupinya. Isu-isu strategis dimaksud antara lain :

1. Politik, ekonomi, dan sosial budaya;
2. Kemasyarakatan;

3. Batas wilayah;
4. Sumber daya alam.

Tabel 2.4
Tujuan dan Sasaran Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

NO	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analis Kebutuhan					Catatan Penting
	Kode	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	8.01.01..	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	100 Persen	9,985,589,917	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	100 Persen	12,209,621,867	
	8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	Persentase Ketersediaan Dokumen perencanaan dan Pelaporan	100 Persen	572,172,000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	Persentase Ketersediaan Dokumen perencanaan dan Pelaporan	100 Persen	1,207,195,000	
	8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	190,032,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	436,240,000	
	8.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	130,320,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	214,717,000	
	8.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	151,820,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	244,157,000	
	8.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	50,000,000	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	39,580,000	
	8.01.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	2 Data	50,000,000	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	2 Data	32,935,000	

	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 persen	7,155,256,817	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 persen	8,552,817,327	
	8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	51 Orang/bulan	7,116,696,817	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	51 Orang/bulan	8,235,777,350	
	8.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	38,560,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	29,040,000	
	8.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	Persentase Ketersediaan Dokumen Laporan Barang Milik Daerah	100 persen	100,720,000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	Persentase Ketersediaan Dokumen Laporan Barang Milik Daerah	100 persen	126,600,000	
	8.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	100,720,000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	92,370,000	
	8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 persen	128,604,340	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 persen	834,475,400	
	8.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	118,500,000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	753,915,400	

	8.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	51 Orang	10,104,340	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	51 Orang	62,420,000	
	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen	662,040,000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen	908,873,593	
	8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	22,470,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3,574,000	
	8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	92,196,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	161,699,100	
	8.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 Paket	50,116,000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 Paket	50,254,493	
	8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	100,036,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	59,802,000	
	8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	100,032,000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	59,884,500	
	8.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	50,000,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	18,000,000	
	8.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	77,400,000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	106,914,000	
	8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	124,740,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	188,783,000	
	8.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen	45,050,000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen	61,150,700	
	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	Persentase pemenuhan Jasa Penunjang	100 persen	1,054,196,760	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	Persentase pemenuhan Jasa Penunjang	100 persen	915,695,324	
	8.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	100,110,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	58,160,700	
	8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	275,966,760	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	0	
	8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	678,120,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	918,734,624	
	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 persen	312,600,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 persen	381,513,000	
	8.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Dokumen	190,032,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Dokumen	436,240,000	
	8.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	138,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	101,782,000	
	8.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit	39,600,000.00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit	39,600,000.00	
	8.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	35,000,000.00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	35,000,000.00	

2	8.01.02..	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	-	Persentase Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	0,09 Persen	9,006,968,800	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	-	Persentase Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	0,09 Persen	6,891,480,420	
	8.01.02.2.01.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	-	Persentase Pemenuhan Fasiltiasi Rumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100 persen	9,006,968,800	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	-	Persentase Pemenuhan Fasiltiasi Rumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100 persen	7,423,366,150	
	8.01.02.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	2 Dokumen	12,598,800	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	2 Dokumen	9,890,000	
	8.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	2000 Orang	4,299,606,000	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	2000 Orang	4,413,159,720	
	8.01.02.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	200 Orang	108,514,000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	200 Orang	86,618,400	
	8.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	2 Laporan	14,685,600	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	2 Laporan	14,640,000	
	8.01.02.2.01.0006	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	87 Keluarga	2,400,000,000	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	87 Keluarga	896,600,500	
	8.01.02.2.01.0007	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	1 Dokumen	39,960,000	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	1 Dokumen	29,358,000	
	8.01.02.2.01.0008	Pembentukan Paskibraka	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paskibraka	60 Orang	2,015,820,000	Pembentukan Paskibraka	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paskibraka	60 Orang	1,368,318,000	
	8.01.02.2.01.0009	Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	1 Dokumen	49,994,400	Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	1 Dokumen	37,237,500	
	8.01.02.2.01.0010	Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	1 Dokumen	35,310,000	Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	1 Dokumen	10,587,300	
	8.01.02.2.01.0011	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila	50 Orang	30,480,000	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila	50 Orang	25,071,000	

3	8.01.03..	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	-	Persentase Pendidikan Politik di Daerah	8,61 Persen	6,273,806,000	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	-	Persentase Pendidikan Politik di Daerah	8,61 Persen	6,529,299,800	
	8.01.03.2.01.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	-	Persentase Pemenuhan Fasiltiasi Rumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	100 persen	6,273,806,000	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	-	Persentase Pemenuhan Fasiltiasi Rumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	100 persen	6,703,916,000	
	8.01.03.2.01.1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	2 Dokumen	13,670,000	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	2 Dokumen	6,582,000	
	8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	700 Orang	6,156,156,500	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	700 Orang	6,379,334,700	
	8.01.03.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	200 Orang	90,309,500	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	200 Orang	123,902,400	
	8.01.03.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	2 Laporan	13,670,000	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	2 Laporan	19,480,700	

4	8.01.04..	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	-	Persentase Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan	14,29 Persen	1,206,548,200	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	-	Persentase Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan	14,29 Persen	827,196,500	
	8.01.04.2.01.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	-	Persentase Pemenuhan Fasiltiasi Rumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	100 persen	1,206,548,200	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	-	Persentase Pemenuhan Fasiltiasi Rumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	100 persen	994,942,700	
	8.01.04.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	2 Dokumen	10,690,000	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	2 Dokumen	6,582,000	
	8.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	400 Orang	654,948,200	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	400 Orang	453,185,400	
	8.01.04.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	200 Orang	530,220,000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	200 Orang	336,440,400	
	8.01.04.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	2 Laporan	10,690,000	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	2 Laporan	30,988,700	
5	8.01.05..	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	-	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	0,91 Persen	931,784,400	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	-	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	0,91 Persen	1,152,080,500	
	8.01.05.2.01.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	-	Persentase Pemenuhan Fasiltiasi Rumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	100 persen	931,784,400	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	-	Persentase Pemenuhan Fasiltiasi Rumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	100 persen	1,576,132,000	
	8.01.05.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	2 Dokumen	12,598,800	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	2 Dokumen	9,890,000	

	8.01.05.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1000 Orang	725,220,000	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1000 Orang	403,762,000	
	8.01.05.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	200 Orang	179,280,000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	200 Orang	726,038,500	
	8.01.05.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	2 Laporan	14,685,600	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	2 Laporan	12,390,000	
6	8.01.06..	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	-	Persentase Pembinaan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	12,94 Persen	3,313,390,000	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	-	Persentase Pembinaan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	12,94 Persen	2,301,128,720	
	8.01.06.2.01.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	-	Persentase Pemenuhan Fasiltiasi Rumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	100 persen	3,313,390,000	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	-	Persentase Pemenuhan Fasiltiasi Rumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	100 persen	2,988,616,000	
	8.01.06.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	2 Dokumen	17,680,000	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	2 Dokumen	11,560,000	
	8.01.06.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	200 Orang	1,923,280,000	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	200 Orang	1,187,257,000	

	8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	200 Orang	277,040,000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	200 Orang	282,286,000	
	8.01.06.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	2 Laporan	111,390,000	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	2 Laporan	266,330,600	
	8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	984,000,000	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	553,695,120	

2.4. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Penelahaan usulan program dan kegiatan masyarakat diutamakan yang merupakan usulan-usulan yang berasal dari aspirasi masyarakat Kabupaten Tangerang. Khusus untuk bidang kesatuan bangsa dan politik, usulan-usulan tersebut tidak dimunculkan/ tidak ada dan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2025

No	Kode	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	12.209.621.867,00	
	8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Ketersediaan Dokumen perencanaan dan Pelaporan	1.207.195.000,00	
	8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	436.240.000,00	
	8.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	214.717.000,00	
	8.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	244.157.000,00	
	8.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	39.580.000,00	
	8.01.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	32.935.000,00	
	8.01.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.552.817.327,00	
	8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	8.235.777.350,00	
	8.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	29.040.000,00	
	8.01.01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase Ketersediaan Dokumen Laporan Barang Milik Daerah	126.600.000,00	
	8.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	92.370.000,00	

	8.01.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	834.475.400,00	
	8.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	753.915.400,00	
	8.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	62.420.000,00	
	8.01.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	908.873.593,00	
	8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3.574.000,00	
	8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	161.699.100,00	
	8.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	50.254.493,00	
	8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	59.802.000,00	
	8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	59.884.500,00	
	8.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	18.000.000,00	
	8.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	106.914.000,00	
	8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	188.783.000,00	
	8.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	61.150.700,00	
	8.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemenuhan Jasa Penunjang	915.695.324,00	
	8.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	58.160.700,00	
	8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0,00	

	8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	918.734.624,00	
	8.01.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	381.513.000,00	
	8.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	205.131.000,00	
	8.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	101.782.000,00	
	8.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	39.600.000,00	
	8.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	35.000.000,00	
2	8.01.02..	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN		Persentase Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	6.891.480.420,00	
	8.01.02.2.01.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		Persentase Pemenuhan Fasiltiasi Rumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	7.423.366.150,00	
	8.01.02.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	9.890.000,00	
	8.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	4.413.159.720,00	
	8.01.02.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	86.618.400,00	

	8.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	14.640.000,00	
	8.01.02.2.01.0006	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	896.600.500,00	
	8.01.02.2.01.0007	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	29.358.000,00	
	8.01.02.2.01.0008	Pembentukan Paskibraka	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paskibraka	1.368.318.000,00	
	8.01.02.2.01.0009	Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	37.237.500,00	
	8.01.02.2.01.0010	Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	10.587.300,00	
	8.01.02.2.01.0011	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila	25.071.000,00	
3	8.01.03..	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK		Persentase Pendidikan Politik di Daerah	6.529.299.800,00	
	8.01.03.2.01.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik		Persentase Pemenuhan Fasiltiasi Rumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	6.703.916.000,00	

	8.01.03.2.01.1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	6.582.000,00	
	8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	6.379.334.700,00	
	8.01.03.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	123.902.400,00	
	8.01.03.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	19.480.700,00	
4	8.01.04..	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN		Persentase Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan	827.196.500,00	
	8.01.04.2.01.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		Persentase Pemenuhan Fasiltiasi Rumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	994.942.700,00	
	8.01.04.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	6.582.000,00	
	8.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	453.185.400,00	

	8.01.04.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	336.440.400,00	
	8.01.04.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	30.988.700,00	
5	8.01.05..	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA		Persentase Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	1.152.080.500,00	
	8.01.05.2.01.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		Persentase Pemenuhan Fasiltiasi Rumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	1.576.132.000,00	
	8.01.05.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	9.890.000,00	
	8.01.05.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	403.762.000,00	
	8.01.05.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	726.038.500,00	
	8.01.05.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	12.390.000,00	

6	8.01.06..	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL		Persentase Pembinaan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	2.301.128.720,00	
	8.01.06.2.01.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		Persentase Pemenuhan Fasiltiasi Rumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	2.988.616.000,00	
	8.01.06.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	11.560.000,00	
	8.01.06.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1.187.257.000,00	
	8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	282.286.000,00	
	8.01.06.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	266.330.600,00	
	8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	553.695.120,00	

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TANGERANG

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Berbeda dengan periode 2024-2026, sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2024 dan Daerah Otonom Baru yang menyebabkan adanya perbedaan pendekatan perumusan tujuan dan sasaran karena tidak tersedianya visi dan misi Kepala Daerah. Sehingga untuk tetap menjaga keselarasan dengan dokumen perencanaan yang masih berlaku dan menjaga kesinambungan pembangunan antar periode, maka Pemerintah Kabupaten Tangerang merumuskan tema Rencana Pembangunan Daerah 2024-2026 yang mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
2. Peraturan Gubernur Banten Nomor 33 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2024-2026.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2005-2025.

Untuk mewujudkan Visi tersebut di atas maka ditetapkan Misi Pemerintah Kabupaten Tangerang sebagai berikut :

1) Mewujudkan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Tangerang yang mandiri, berdaya saing tinggi dan berakhlak mulia;
2) Mewujudkan perekonomian daerah yang maju dan berdaya saing berbasis pada potensi keunggulan lokal;
3) Mewujudkan pelayanan dasar bagi masyarakat secara merata dan proporsional;
4) Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, demokratis dan partisipatif; dan
5) Mewujudkan pembangunan yang terpadu dan serasi dengan pendekatan
6) pengembangan wilayah berbasis ekonomi dan ekologi.

Dalam rangka mensinergikan pembangunan nasional dengan pembangunan daerah Kabupaten Tangerang, maka berdasarkan Rancangan Awal RKP Tahun 2025 dan RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2024 dapat disusun hubungan antara Kebijakan Pembangunan Nasional dengan Kebijakan Pemerintah Kabupaten Tangerang Tahun 2024.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tangerang

Tujuan dan sasaran merupakan suatu kondisi yang ingin dicapai dalam jangka waktu Tiga tahun kedepan dimana hal tersebut bentuk penjabaran dari visi dan misi yang ditetapkan oleh Dinas Perhubungan. Tujuan sendiri lebih mengarah pada

perumusan sasaran, kebijakan dan program. Sedangkan sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dengan rumusan yang lebih spesifik, terukur dan dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Tujuan yang ingin dicapai adalah Meningkatnya kualitas Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perhubungan. Berdasarkan tujuan tersebut, terdapat 1 (Satu) sasaran yang akan dicapai, adalah Mengatasi Ketimpangan Aksesibilitas Transportasi Antar Wilayah.dari tugas pokok dan fungsi BadanKesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Tangerang.

3.3 Rencana Kerja Dan Pendanaan

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan merupakan acuan setiap perangkat daerah (PD) dalam mengoperasionalkan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi jangka menengah daerah. Dengan rencana kerja yang terukur dan didukung oleh pendanaan, maka menjadi suatu instrumen dan indikator yang digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah. Adapun kerangka Rencana Kerja Dan Pendanaan (Rancangan RKPD) Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Rencana Kerja Dan Pendanaan (Rancangan RKPD) Tahun 2025

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan Tahun Lalu					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi & Kelompok Sasaran)	Target Capaian Kinerja (Tahun Rencana	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Sumber dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
									SBLP	STLP				
1					*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik				30.718.087.317,00	29.910.807.807,00				63.522.519.200,00
8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM				30.718.087.317,00	29.910.807.807,00				63.522.519.200,00
8	01				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				30.718.087.317,00	29.910.807.807,00				63.522.519.200,00
8	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan			9.985.589.917,00	12.209.621.867,00				20.772.519.200,00
8	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen perencanaan dan Pelaporan			572.172.000,00	1.207.195.000,00				950.000.000,00
8	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Tangerang, Semua Kecamata		190.032.000,00	436.240.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			220.000.000,00

							n, Semua Kel/Desa							
8	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		130.320.000,00	214.717.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			160.000.000,00
8	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		151.820.000,00	244.157.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			270.000.000,00
8	01	01	2.01	0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		50.000.000,00	39.580.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			150.000.000,00
8	01	01	2.01	0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		50.000.000,00	32.935.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			150.000.000,00
8	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			7.155.256.817,00	8.552.817.327,00				14.720.000.000,00
8	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Tangerang, Semua Kecamata		7.116.696.817,00	8.235.777.350,00	"PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			

							n, Semua Kel/Desa							
8	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)"			14.500.000.000,00				
8	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Laporan Barang Milik Daerah	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		38.560.000,00	29.040.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			220.000.000,00
8	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			100.720.000,00	126.600.000,00				300.000.000,00
8	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		100.720.000,00	92.370.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			300.000.000,00
8	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			128.604.340,00	834.475.400,00				252.858.800,00
8	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		118.500.000,00	753.915.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			102.858.800,00

8	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		10.104.340,00	62.420.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			150.000.000,00
8	01	01	2.06	0001	"Penyediaan Komponen Instalasi				662.040.000,00	908.873.593,00				2.780.000.000,00
8	01	01	2.06	0002			Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		22.470.000,00	3.574.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			50.000.000,00
8	01	01	2.06	0003	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor"	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		92.196.000,00	161.699.100,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1.000.000.000,00
8	01	01	2.06	0004	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		50.116.000,00	50.254.493,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			100.000.000,00
8	01	01	2.06	0005	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		100.036.000,00	59.802.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			380.000.000,00
8	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Tangerang, Semua		100.032.000,00	59.884.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			200.000.000,00

							Kecamatan, Semua Kel/Desa							
8	01	01	2.06	0008	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		50.000.000,00	18.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			50.000.000,00
8	01	01	2.06	0009	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		77.400.000,00	106.914.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			200.000.000,00
8	01	01	2.06	0010	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		124.740.000,00	188.783.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			700.000.000,00
8	01	01	2.08		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		45.050.000,00	61.150.700,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			100.000.000,00
8	01	01	2.08	0001	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			1.054.196.760,00	915.695.324,00				1.100.000.000,00
8	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Jasa Penunjang	Kab. Tangerang, Semua Kecamata		100.110.000,00	58.160.700,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			200.000.000,00

							n, Semua Kel/Desa							
8	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		275.966.760,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			300.000.000,00
8	01	01	2.09		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		678.120.000,00	918.734.624,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			600.000.000,00
8	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			312.600.000,00	381.513.000,00				669.660.400,00
8	01	01	2.09	0002	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		100.000.000,00	205.131.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			232.378.400,00
8	01	01	2.09	0006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		138.000.000,00	101.782.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			255.332.000,00
8	01	01	2.09	0009	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan	Kab. Tangerang, Semua Kecamata		39.600.000,00	39.600.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			75.000.000,00

					Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	dibayarkan Pajak dan Perizinannya	n, Semua Kel/Desa							
8	01	02			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		35.000.000,00	35.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			106.950.000,00
8	01	02	2.01		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			9.006.968.800,00	6.891.480.420,00				21.110.000.000,00
8	01	02	2.01	0001	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan			9.006.968.800,00	7.423.366.150,00				21.110.000.000,00
8	01	02	2.01	0003	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Pemenuhan Fasiltiasi Rumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		12.598.800,00	9.890.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			150.000.000,00
8	01	02	2.01	0004	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		4.299.606.000,00	4.413.159.720,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			7.000.000.000,00
8	01	02	2.01	0005	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan	Kab. Tangeran		108.514.000,00	86.618.400,00	PENDAPATAN ASLI			500.000.000,00

					Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	g, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa				DAERAH (PAD)			
8	01	02	2.01	0006	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		14.685.600,00	14.640.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			60.000.000,00
8	01	02	2.01	0007	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		2.400.000.000,00	896.600.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			3.000.000.000,00
8	01	02	2.01	0008	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		39.960.000,00	29.358.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			2.000.000.000,00

					Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara								
8	01	02	2.01	0009	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		2.015.820.000,00	1.368.318.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			6.000.000.000,00
8	01	02	2.01	0010	Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		49.994.400,00	37.237.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			800.000.000,00
8	01	02	2.01	0011	Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		35.310.000,00	10.587.300,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			800.000.000,00
8	01	03			Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		30.480.000,00	25.071.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			800.000.000,00
8	01	03	2.01		Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila			6.273.806.000,00	6.529.299.800,00				3.710.000.000,00
8	01	03	2.01	0001	PROGRAM PENINGKATAN PERAN	Persentase Pendidikan Politik di Daerah			6.273.806.000,00	6.703.916.000,00				3.710.000.000,00

					PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK									
8	01	03	2.01	0003	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase Pemenuhan Fasiltiasi Rumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		13.670.000,00	6.582.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			150.000.000,00
8	01	03	2.01	0004	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		6.156.156.500,00	6.379.334.700,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			3.000.000.000,00

					Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun								
8	01	03	2.01	0005	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		90.309.500,00	123.902.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			500.000.000,00
8	01	04			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		13.670.000,00	19.480.700,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			60.000.000,00

8	01	04	2.01		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			1.206.548.200,00	827.196.500,00				3.560.000.000,00
8	01	04	2.01	0001	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan			1.206.548.200,00	994.942.700,00				3.560.000.000,00
8	01	04	2.01	0003	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Pemenuhan Fasiltiasi Rumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		10.690.000,00	6.582.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			150.000.000,00
8	01	04	2.01	0004	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		654.948.200,00	453.185.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			2.850.000.000,00

					Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Ormas Asing di Daerah yang Disusun								
8	01	04	2.01	0005	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		530.220.000,00	336.440.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			500.000.000,00
8	01	05			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		10.690.000,00	30.988.700,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			60.000.000,00
8	01	05	2.01		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah			931.784.400,00	1.152.080.500,00				7.260.000.000,00
8	01	05	2.01	0001	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan			931.784.400,00	1.576.132.000,00				7.260.000.000,00

					KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Ekonomi, Sosial, dan Budaya								
8	01	05	2.01	0003	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Pemenuhan Fasiltiasi Rumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		12.598.800,00	9.890.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			200.000.000,00
8	01	05	2.01	0004	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		725.220.000,00	403.762.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			6.500.000.000,00
8	01	05	2.01	0005	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		179.280.000,00	726.038.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			500.000.000,00

8	01	06			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		14.685.600,00	12.390.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			60.000.000,00
8	01	06	2.01		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah			3.313.390.000,00	2.301.128.720,00				7.110.000.000,00
8	01	06	2.01	0001	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Pembinaan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik			3.313.390.000,00	2.988.616.000,00				7.110.000.000,00

8	01	06	2.01	0003	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase Pemenuhan Fasiltiasi Rumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		17.680.000,00	11.560.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			150.000.000,00
8	01	06	2.01	0004	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		1.923.280.000,00	1.187.257.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			4.900.000.000,00
8	01	06	2.01	0005	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		277.040.000,00	282.286.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			500.000.000,00

8	01	06	2.01	0006	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		111.390.000,00	266.330.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			60.000.000,00

BAB IV
PENUTUP

Renja Perubahan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Tangerang Tahun 2025 merupakan sebuah gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama tahun anggaran berjalan guna merealisasikan tujuan dan sasaran dengan memperhatikan kemampuan anggaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tangerang maupun dari APBD Provinsi Banten. Seluruh program dan kegiatan yang di rencanakan diharapkan akan bisa menutupi seluruh kebutuhan program pengawasan dan sebagai penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tangerang dan RKPD Provinsi Banten yang di sesuaikan juga dengan pagu anggaran yang diterima Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik.

16. Dinas Sosial

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja SKPD merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja SKPD) untuk penyesuaian perencanaan tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) SKPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah disusun dalam Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Perubahan RKPD).

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Proses penyusunan Renja perubahan perangkat daerah dimulai dengan persiapan penyusunan Renja perangkat daerah dengan mengumpulkan bahan pengolahan data dan informasi serta menganalisa gambaran pelayanan perangkat daerah untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi renja perangkat daerah tahun lalu sesuai Renstra perangkat daerah yang didasarkan pada penelaahan rancangan awal perangkat daerah yang selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan pada penelaahan usulan kegiatan masyarakat.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Tangerang Tahun 2025, memuat Pagu Anggaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, Lokasi dan kelompok Sasaran yang disertai indikator kinerja dan dan pendanaan sesuai dengan kebutuhan. Perubahan Rencana Kerja didasarkan pada hasil percepatan dan penyesuaian Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, berdasarkan evaluasi Renja Dinas Sosial Kabupaten Tangerang sampai Triwulan I Tahun Anggaran 2025.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Tangerang Tahun 2025 disusun sebagai bahan acuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Sosial Kabupaten Tangerang Tahun 2025, dengan memperhatikan dimensi waktu serta permasalahan- permasalahan yang berkembang pada masa yang

akan datang sehingga dapat memberikan dampak yang optimal dalam pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah.

Dengan demikian Rencana Kerja Perubahan Dinas Sosial Kabupaten Tangerang dapat menjadi pedoman acuan kerja bagi Penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-P) Dinas Sosial Kabupaten Tangerang Tahun 2025.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukun penyusunan Perubahan Renja Dinas Sosial Kabupaten Tangerang Tahun 2025, adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10).
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).
10. Keputusan Meteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Validasi dan Invenrarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 tahun 2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 9);

12. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 12);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembar Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0222);
14. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 39 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026(Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2023 Nomor 39);
15. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Tangerang (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2023 Nomor 8).

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 MAKSUD

Rencana Kerja (Renja) perubahan Dinas Sosial Kabupaten Tangerang Tahun 2025 ditetapkan dengan maksud sebagai berikut:

1. Sebagai dokumen perencanaan bagi Dinas Sosial Kabupaten Tangerang untuk kurun waktu tahun 2025 yang mencakup program, kegiatan, Sub Kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan Perubahan RKPD;
2. Sebagai instrumen evaluasi capaian tolok ukur kinerja impact sasaran, outcome program dan output kegiatan serta sub kegiatan Renja tahun berjalan dan capaian Renstra Dinas Sosial sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.3.2 TUJUAN

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan ini adalah untuk :

1. Sebagai acuan dalam mengoperasionalkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam ranfka mencapai visi dan misi pemerintah daerah;
2. Menjadi pedoman bagi Dinas Sosial dalam menyusun perubahan rencana kerja dan anggaran tahun 2025;
3. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah dalam kurun waktu tahun 2025 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Sosial Tahun 2025 disusun dengan menggunakan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Maksud dan Tujuan
- 1.3. Landasan Hukum
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II Evaluasi Renja PD sampai dengan triwulan I

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja sampai dengan triwulan I
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan;
- 2.3. Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Fungsi SKPD
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD;

BAB III Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB IV Penutup

BAB II
EVALUASI RENJA PD
SAMPAI DENGAN TRIWULAN I

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I

Dinas Sosial Kabupaten Tangerang memiliki 1 urusan yaitu Urusan Sosial pada Tahun Tahun 2025 terdiri atas 7 (tujuh) Program 16 (enam belas) Kegiatan dan 58 Sub Kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

   a. Kegiatan Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan sub kegiatan :
      - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
      - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
      - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

   b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
      - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
      - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
      - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
      - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

   c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
      - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD

   d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
      - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

   e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
      - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
      - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
      - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
      - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
      - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

- Fasilitasi Kunjungan Tamu
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan :

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan :

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya"

2. PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL

a. Kegiatan Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :

- Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang

b. Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :

- Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
- Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota
- Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
- Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota

3. PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN

a. Kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal, dengan sub kegiatan :

- Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal

4. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL

a. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar. Anak Terlantar. Lanjut Usia Terlantar. serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial, dengan sub kegiatan :

- Penyediaan Permakanan
- Penyediaan Sandang
- Penyediaan Alat Bantu
- Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
- Pemberian Bimbingan Fisik. Mental. Spiritual. dan Sosial
- Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar. Anak Terlantar. Lanjut Usia Terlantar. serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat
- Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak
- Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
- Pemberian Layanan Data dan Pengaduan
- Pemberian Layanan Kedaruratan
- Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
- Pemberian Layanan Rujukan

b. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial, dengan sub kegiatan :

- Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti
- Pemberian Bimbingan Fisik. Mental. Spiritual. dan Sosial
- Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
- Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota

5. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

a. Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :

- Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
- Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
- Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
- Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat

6. PROGRAM PENANGANAN BENCANA

a . Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :

- Penyediaan Makanan
- Penyediaan Sandang
- Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi
- Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan
- Pelayanan Dukungan Psikososial

b. Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :

- Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana
- Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana

7. PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN

a. Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :

- Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
- Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
- Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

Capaian sasaran yang telah ditargetkan Dinas Sosial Tahun 2025 tidak terlepas dari adanya dukungan dana yang telah dianggarkan dalam anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Tangerang, sebagai berikut :

Tabel 2.1
Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2025
s.d Triwulan I

No	Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi	Sisa	%
1	**Belanja Operasi**	**75.636.200.149**	**4.330.416.519**	**71.305.783.630**	**5,73**
1.1	Belanja Pegawai	11.275.060.995	2.722.953.738	8.552.107.257	24,2
1.2	Belanja Barang dan Jasa	54.858.339.154	1.607.462.781	53.250.876.373	2,93
1.3	Belanja Hibah	324.200.000	0	324.200.000	0
1.4	Belanja Bantuan Sosial	9.178.600.000	0	9.178.600.000	0
2	**Belanja Modal**	**530.623.233**	**39.000.000**	**491.623.233**	**7,35**
2.1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	530.623.233	39.000.000	491.623.233	7,35
	TOTAL BELANJA DAERAH	**76.166.823.382**	**4.369.416.519**	**71.797.406.863**	**5,74**

Berdasarkan tabel diatas pada tahun 2025 Dinas Sosial mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 76.166.823.382,- (Tujuh

Puluh Enam Miliyar Seratus Enam Puluh Enam Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah) dengan realisasi anggaran sampai dengan triwulan I ini sebesar Rp. 4.369.416.519,- (Empat Miliyar Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Enam Belas Ribu Lima Ratus Sembilan Belas Rupiah) atau setara dengan 5,74% dari total anggaran. sebagian bersar pelaksanaan realisasi sudah sesuai dengan target yang direncanakan oleh Dinas Sosial, namun demikian tidak terlepas dari adanya perubahan perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan asumsi yang berdampak terhadap keuangan daerah yang mengakibatkan terjadinya pada perubahan penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan. Rincian pencapaian target kinerja keuangan sampai dengan triwulan I Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

Kode Rekening	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Sisa Anggaran (Rp.)	Capaian Keuangan (%)
1	2	3	4	5	6
ALOKASI BELANJA KEGIATAN					
1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**	**76.166.823.382**	**4.369.416.519**	**71.797.406.863**	**5,74%**
1.06.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA**	**14.735.435.548**	**3.286.170.769**	**11.449.264.779**	**22,30%**
1.06.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**204.764.000**	**33.414.000**	**171.350.000**	**16,32%**
1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	124.767.000	19.207.000	105.560.000	15,39%
1.06.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	27.479.000	14.207.000	13.272.000	51,70%
1.06.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	52.518.000		52.518.000	0,00%
1.06.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**11.362.176.695**	**2.726.092.738**	**8.636.083.957**	**23,99%**
1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.275.060.995	2.722.953.738	8.552.107.257	24,15%
1.06.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	39.892.700	3.139.000	36.753.700	7,87%
1.06.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/	37.840.000		37.840.000	0,00%

Kode Rekening	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Sisa Anggaran (Rp.)	Capaian Keuangan (%)
1	2	3	4	5	6
	Triwulanan/ Semesteran SKPD				
1.06.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	9.383.000		9.383.000	0,00%
1.06.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**9.796.328**	**-**	**9.796.328**	**0,00%**
1.06.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	9.796.328		9.796.328	0,00%
1.06.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**266.921.350**	**63.061.800**	**203.859.550**	**23,63%**
1.06.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	136.898.400	63.061.800	73.836.600	46,06%
1.06.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	130.022.950		130.022.950	0,00%
1.06.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**1.206.870.836**	**196.506.040**	**1.010.364.796**	**16,28%**
1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasirnnListrik/Penerangan Bangunan Kantor	22.585.059	22.554.090	30.969	99,86%
1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	522.989.985	0	522.989.985	0,00%
1.06.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	42.446.957	27.250.000	15.196.957	64,20%
1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	103.517.105	102.576.950	940.155	99,09%
1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	41.370.730	0	41.370.730	0,00%
1.06.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	77.035.000	7.470.000	69.565.000	9,70%
1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	396.926.000	36.655.000	360.271.000	9,23%
1.06.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.048.599.222**	**222.176.191**	**826.423.031**	**21,19%**
1.06.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	132.433.862	2.652.000	129.781.862	2,00%
1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	42.998.292	8.524.191	34.474.101	19,82%
1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	873.167.068	211.000.000	662.167.068	24,16%
1.06.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**636.307.117**	**44.920.000**	**591.387.117**	**7,06%**
1.06.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	433.462.117	44.920.000	388.542.117	10,36%
1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	39.750.000	0	39.750.000	0,00%
1.06.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	163.095.000	0	163.095.000	0,00%
1.06.02	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**4.407.685.330**	**3.504.000**	**4.404.181.330**	**0,08%**
1.06.02.2.02	**Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**37.280.400**	**-**	**37.280.400**	**0,00%**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Sisa Anggaran (Rp.)	Capaian Keuangan (%)
1	2	3	4	5	6
1.06.02.2.02.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	37.280.400	0	37.280.400	0,00%
1.06.02.2.03	**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**	**4.370.404.930**	**3.504.000**	**4.366.900.930**	**0,08%**
1.06.02.2.03.0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	219.417.450	0	219.417.450	0,00%
1.06.02.2.03.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	222.424.400	3.504.000	218.920.400	1,58%
1.06.02.2.03.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	3.511.003.000	0	3.511.003.000	0,00%
1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	379.491.700	0	379.491.700	0,00%
1.06.02.2.03.0005	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	38.068.380	0	38.068.380	0,00%
1.06.03	**PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN**	**14.319.400**	**-**	**14.319.400**	**0,00%**
1.06.03.2.01	**Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal**	**14.319.400**	**-**	**14.319.400**	**0,00%**
1.06.03.2.01.0001	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	14.319.400	0	14.319.400	0,00%
1.06.04	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**2.549.237.784**	**649.658.250**	**1.899.579.534**	**25,48%**
1.06.04.2.01	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**	**2.388.456.109**	**643.258.250**	**1.745.197.859**	**26,93%**
1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan	340.058.500	108.125.000	231.933.500	31,80%
1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang	177.349.000	43.956.250	133.392.750	24,79%
1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu	750.008.000	298.380.000	451.628.000	39,78%
1.06.04.2.01.0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	201.279.400	46.363.000	154.916.400	23,03%

Kode Rekening	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Sisa Anggaran (Rp.)	Capaian Keuangan (%)
1	2	3	4	5	6
1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	549.759.209	109.470.000	440.289.209	19,91%
1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	146.215.200	0	146.215.200	0,00%
1.06.04.2.01.0007	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	9.518.800	2.580.000	6.938.800	27,10%
1.06.04.2.01.0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	22.163.400	5.766.000	16.397.400	26,02%
1.06.04.2.01.0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	10.328.800	3.390.000	6.938.800	32,82%
1.06.04.2.01.0010	Pemberian Layanan Kedaruratan	134.937.000	16.518.000	118.419.000	12,24%
1.06.04.2.01.0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	38.400.000	6.400.000	32.000.000	16,67%
1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan	8.438.800	2.310.000	6.128.800	27,37%
1.06.04.2.02	**Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**	**160.781.675**	**6.400.000**	**154.381.675**	**3,98%**
1.06.04.2.02.0006	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	58.733.875	0	58.733.875	0,00%
1.06.04.2.02.0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	41.650.000	0	41.650.000	0,00%
1.06.04.2.02.0012	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	39.098.800	6.400.000	32.698.800	16,37%
1.06.04.2.02.0014	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	21.299.000	0	21.299.000	0,00%
1.06.05	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**52.947.463.920**	**145.940.000**	**52.801.523.920**	**0,28%**
1.06.05.2.02	**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**52.947.463.920**	**145.940.000**	**52.801.523.920**	**0,28%**
1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1.455.323.800	145.940.000	1.309.383.800	10,03%
1.06.05.2.02.0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	45.217.404.120	0	45.217.404.120	0,00%
1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	5.408.334.000	0	5.408.334.000	0,00%
1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	866.402.000	0	866.402.000	0,00%
1.06.06	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**1.278.314.000**	**269.844.500**	**1.008.469.500**	
1.06.06.2.01	**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**	**987.281.000**	**250.839.500**	**736.441.500**	**25,41%**
1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan	701.983.000	130.252.000	571.731.000	18,55%

Kode Rekening	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Sisa Anggaran (Rp.)	Capaian Keuangan (%)
1	2	3	4	5	6
1.06.06.2.01.0002	Penyediaan Sandang	249.800.000	120.587.500	129.212.500	48,27%
1.06.06.2.01.0003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	6.260.000	0	6.260.000	0,00%
1.06.06.2.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	18.446.000	0		0,00%
1.06.06.2.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	10.792.000	0	10.792.000	0,00%
1.06.06.2.02	**Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota**	**291.033.000**	**19.005.000**	**272.028.000**	**6,53%**
1.06.06.2.02.0001	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	171.228.000	0	171.228.000	0,00%
1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	119.805.000	19.005.000	100.800.000	15,86%
1.06.07	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	**234.367.400**	**14.299.000**	**220.068.400**	**6,10%**
1.06.07.2.01	**Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota**	**234.367.400**	**14.299.000**	**220.068.400**	**6,10%**
1.06.07.2.01.0001	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	43.530.100	5.218.000	38.312.100	11,99%
1.06.07.2.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	154.513.300	0	154.513.300	0,00%
1.06.07.2.01.0003	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	36.324.000	9.081.000	27.243.000	25,00%
Total Alokasi Belanja		**76.166.823.382**	**4.369.416.519**	**71.797.406.863**	**5,74%**

Tabel 2.3
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (Kondisi Awal)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (tahun berjalan)	
						Target	Realisasi	Capaian %		Realisasi Capaian Program Kegiatan s.d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian %
1	*2*	*3*		*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10*	*11=(10/4)*
1.06.02	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**Capaian Program :**	**Persentase PSKS yang meningkat perannya dalam usaha kesejahteraan sosial**	**83,82 Persen**	**67,99 Persen**	**76,87 Persen**	**76,87 Persen**	**100,00 %**	**100,00 Persen**	**100,00 Persen**	**119,30%**
1.06.02.2.02	**Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Keluaran :**	**Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang**	**61 Dokumen**	**10 Dokumen**	**16 Dokumen**	**16 Dokumen**	**100,00 %**	**20 Dokumen**	**36 Dokumen**	**59,02%**
		Hasil :	**Persentase Dunia Usaha yang meningkat perannya dalam usaha kesejahteraan sosial**	**8,16 Persen**	**0,00 Persen**	**2,13 Persen**	**2,13 Persen**	**100,00 %**	**1,70 Persen**	**3,83 Persen**	**46,94%**
1.06.02.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Keluaran :	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	61 Dokumen	10 Dokumen	16 Dokumen	16 Dokumen	100,00%	20 Dokumen	36 Dokumen	59,02%
1.06.02.2.03	**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**	**Keluaran :**	**Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang meningkat kapasitasnya**	**1742 Orang**	**1109 Orang**	**559 Orang**	**559 Orang**	**100,00 %**	**1157 Orang**	**1716 Orang**	**98,51%**
		Hasil :	**Persentase PSKS yang meningkat perannya dalam usaha kesejahteraan sosial**	**80,48 Persen**	**67,99 Persen**	**74,73 Persen**	**74,73 Persen**	**100,00 %**	**74,73 Persen**	**74,73 Persen**	**92,86%**
1.06.02.2.03.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluaran :	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	930 Orang	350 Orang	300 Orang	300 Orang	100,00%	368 Orang	668 Orang	71,83%
1.06.02.2.03.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluaran :	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	87 Orang	29 Orang	29 Orang	29 Orang	100,00%	29 Orang	58 Orang	66,67%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (Kondisi Awal)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (tahun berjalan)	
						Target	Realisasi	Capaian %		Realisasi Capaian Program Kegiatan s.d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian %
1	*2*	*3*		*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10*	*11=(10/4)*
1.06.02.2.03.03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluaran :	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	584 Keluarga	700 Keluarga	190 Keluarga	190 Keluarga	100,00%	700 Keluarga	890 Keluarga	152,40%
1.06.02.2.03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluaran :	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	135 Lembaga	30 Lembaga	40 Lembaga	40 Lembaga	100,00%	60 Lembaga	100 Lembaga	74,07%
1.06.02.2.03.05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Keluaran :	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Sertifikat	NA	0 Sertifikat	0 Sertifikat	0,00%	3 Sertifikat	3 Sertifikat	50,00%
1.06.03	**PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN**	**Capaian Program :**	**Prosentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan**	**100 Persen**	**0 Persen**	**33,33 Persen**	**3,33 Persen**	**10,00%**	**33,33 Persen**	**36,66 Persen**	**36,66%**
1.06.03.2.01	**Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal**	**Keluaran :**	**Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota**	**30 Orang**	**0 Orang**	**10 Orang**	**1 Orang**	**10,00%**	**10 Orang**	**11 Orang**	**36,67%**
		Hasil :	**Prosentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan**	**100 Persen**	**0 Persen**	**33,33 Persen**	**3,33 Persen**	**10,00%**	**33,33 Persen**	**36,66 Persen**	**36,66%**
1.06.03.2.01.01	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Keluaran :	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	0 Orang	10 Orang	1 Orang	10,00%	10 Orang	11 Orang	36,67%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (Kondisi Awal)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (tahun berjalan)	
						Target	Realisasi	Capaian %		Realisasi Capaian Program Kegiatan s.d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian %
1	*2*	*3*		*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10*	*11=(10/4)*
1.06.04	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**Capaian Program :**	**Persentase PPKS yang mendapatkan rehabilitasi sosial**	**100 Persen**	**0,15 Persen**	**29,96 Persen**	**30,05 Persen**	**100,29 %**	**36,11 Persen**	**66,16 Persen**	**66,16%**
1.06.04.2.01	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**	**Keluaran :**	**Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis di Luar Panti Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya**	**3964 Orang**	**680 Orang**	**1495 Orang**	**1500 Orang**	**100,33 %**	**1836 Orang**	**3336 Orang**	**84,16%**
		Hasil :	**Peresentase Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar dan gelandangan pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial**	**84,93 Persen**	**0,11 Persen**	**25,45 Persen**	**25,54 Persen**	**100,35 %**	**31,26 Persen**	**56,80 Persen**	**66,88%**
1.06.04.2.01.01	Penyediaan Permakanan	Keluaran :	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	1025 Orang	250 Orang	300 Orang	300 Orang	100,00%	350 Orang	650 Orang	63,41%
1.06.04.2.01.02	Penyediaan Sandang	Keluaran :	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	900 Orang	200 Orang	250 Orang	250 Orang	100,00%	350 Orang	600 Orang	66,67%
1.06.04.2.01.03	Penyediaan Alat Bantu	Keluaran :	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	445 Orang	100 Orang	120 Orang	120 Orang	100,00%	350 Orang	470 Orang	105,62%
1.06.04.2.01.04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Keluaran :	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	120 Orang	0 Orang	35 Orang	43 Orang	122,86%	93 Orang	136 Orang	113,33%
1.06.04.2.01.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Keluaran :	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	490 Orang	150 Orang	160 Orang	160 Orang	100,00%	160 Orang	320 Orang	65,31%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (Kondisi Awal)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (tahun berjalan)	
						Target	Realisasi	Capaian %		Realisasi Capaian Program Kegiatan s.d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian %
1	*2*	*3*		*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10*	*11=(10/4)*
1.06.04.2.01.06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Keluaran :	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	310 Orang	130 Orang	90 Orang	90 Orang	100,00%	100 Orang	190 Orang	61,29%
1.06.04.2.01.07	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Keluaran :	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	240 Orang	0 Orang	70 Orang	70 Orang	100,00%	70 Orang	140 Orang	58,33%
1.06.04.2.01.08	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Keluaran :	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	445 Orang	0 Orang	145 Orang	145 Orang	100,00%	30 Orang	175 Orang	39,33%
1.06.04.2.01.09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Keluaran :	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	120 Orang	0 Orang	35 Orang	35 Orang	100,00%	35 Orang	70 Orang	58,33%
1.06.04.2.01.10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Keluaran :	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	359 Orang	100 Orang	119 Orang	116 Orang	97,48%	185 Orang	301 Orang	83,84%
1.06.04.2.01.11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Keluaran :	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	390 Orang	0 Orang	130 Orang	130 Orang	100,00%	72 Orang	202 Orang	51,79%
1.06.04.2.01.12	Pemberian Layanan Rujukan	Keluaran :	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayaanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	145 Orang	0 Orang	41 Orang	41 Orang	100,00%	41 Orang	82 Orang	56,55%
1.06.04.2.02	**Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan**	**Keluaran :**	**Jumlah PPKS Lainnya yang bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang mendapatkan rehabilitasi sosial**	**885 Orang**	**250 Orang**	**265 Orang**	**265 Orang**	**100,00 %**	**285 Orang**	**550 Orang**	**62,15%**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (Kondisi Awal)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (tahun berjalan)	
						Target	Realisasi	Capaian %		Realisasi Capaian Program Kegiatan s.d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian %
1	*2*	*3*		*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10*	*11=(10/4)*
	NAPZA di Luar Panti Sosial										
		Hasil :	**Peresentase PPKS Lainnya yang bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yangmendapatkan rehabilitasi sosial**	**15,07 Persen**	**0,04 Persen**	**4,51 Persen**	**4,51 Persen**	**100,00 %**	**4,85 Persen**	**9,36 Persen**	**62,11%**
1.06.04.2.02.06	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Keluaran :	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	180 Orang	0 Orang	55 Orang	55 Orang	100,00%	55 Orang	110 Orang	61,11%
1.06.04.2.02.07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Keluaran :	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	310 Orang	140 Orang	30 Orang	30 Orang	100,00%	128 Orang	158 Orang	50,97%
1.06.04.2.02.12	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Keluaran :	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	360 Orang	100 Orang	180 Orang	180 Orang	100,00%	72 Orang	252 Orang	70,00%
1.06.04.2.02.14	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Keluaran :	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	35 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	100,00%	30 Dokumen	40 Dokumen	114,29%
1.06.05	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**Capaian Program :**	**Persentase masyarakat miskin yg mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**105,73 Persen**	**105,73 %**	**100 Persen**	**103 Persen**	**102,87%**
1.06.05.2.02	**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Keluaran :**	**Jumlah Masyarakat Miskin yang mendapatkan perlindungan jaminan sosial**	**523484 Orang**	**174340 Orang**	**327490 Orang**	**347690 Orang**	**106,17 %**	**628850 Orang**	**976540 Orang**	**186,55%**
		Hasil :	**Persentase Pemenuhan Perlindungan Jaminan Sosial**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**106 Persen**	**105,73 %**	**100 Persen**	**103 Persen**	**102,87%**
1.06.05.2.02.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Keluaran :	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	369900 Orang	123300 Orang	123300 Orang	142290 Orang	115,40%	123300 Orang	265590 Orang	71,80%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (Kondisi Awal)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (tahun berjalan)	
						Target	Realisasi	Capaian %		Realisasi Capaian Program Kegiatan s.d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian %
1	*2*	*3*		*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10*	*11=(10/4)*
1.06.05.2.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Keluaran :	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	150000 Keluarga	50000 Orang	200000 Keluarga	200000 Keluarga	100,00%	50000 Keluarga	250000 Keluarga	166,67%
1.06.05.2.02.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Keluaran :	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	3000 Keluarga	1000 Keluarga	4000 Keluarga	5097 Keluarga	127,43%	5150 Keluarga	10247 Keluarga	341,57%
1.06.05.2.02.04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Keluaran :	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	584 Orang	40 Orang	190 Orang	303 Orang	159,47%	400 Orang	703 Orang	120,38%
1.06.06	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**Capaian Program :**	**Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten/Kota**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100,00 %**	**100 Persen**	**67 Persen**	**66,67%**
1.06.06.2.01	**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**	**Keluaran :**	**Jumlah Orang/Kelompok yang mendapatkan perlindungan sosial**	**3918 Orang**	**980 Orang**	**1195 Orang**	**1195 Orang**	**100,00 %**	**1195 Orang**	**2390 Orang**	**61,00%**
		Hasil :	**Persentase Cakupan Penanganan Perlindungan Sosial bagi Korban Bencana Alam dan Sosial**	**300 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100,00 %**	**100 Persen**	**67 Persen**	**22,22%**
1.06.06.2.01.01	Penyediaan Makanan	Keluaran :	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	1950 Orang	520 Orang	600 Orang	600 Orang	100,00%	3300 Orang	3900 Orang	200,00%
1.06.06.2.01.02	Penyediaan Sandang	Keluaran :	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	1800 Orang	400 Orang	550 Orang	550 Orang	100,00%	650 Orang	1200 Orang	66,67%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (Kondisi Awal)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (tahun berjalan)	
						Target	Realisasi	Capaian %		Realisasi Capaian Program Kegiatan s.d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian %
1	*2*	*3*		*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10*	*11=(10/4)*
1.06.06.2.01.03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Keluaran :	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	18 Unit	20 Unit	5 Unit	5 Unit	100,00%	6 Unit	11 Unit	61,11%
1.06.06.2.01.04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Keluaran :	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	75 Orang	0 Orang	20 Orang	20 Orang	100,00%	65 Orang	85 Orang	113,33%
1.06.06.2.01.05	Pelayanan Dukungan Psikososial	Keluaran :	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	75 Orang	40 Orang	20 Orang	20 Orang	100,00%	65 Orang	85 Orang	113,33%
1.06.06.2.02	**Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota**	**Keluaran :**	**Jumlah Item Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota**	**24 Item**	**7 Item**	**7 Item**	**7 Item**	**100,00 %**	**7 Item**	**14 Item**	**58,33%**
		Hasil :	**Prosentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100,00 %**	**100 Persen**	**67 Persen**	**66,67%**
1.06.06.2.02.01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Keluaran :	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	21 Kampung	7 Kampung	6 Kampung	6 Kampung	100,00%	6 Kampung	12 Kampung	57,14%
1.06.06.2.02.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Keluaran :	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	450 Orang	158 Orang	150 Orang	150 Orang	100,00%	150 Orang	300 Orang	66,67%
1.06.07	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	**Capaian Program :**	**Persentase pemenuhan pemeliharaan TMP**	**90 Persen**	**80 Persen**	**80 Persen**	**80 Persen**	**100,00 %**	**80 Persen**	**80 Persen**	**88,89%**
1.06.07.2.01	**Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota**	**Keluaran :**	**Jumlah Dokumen dan Laporan Hasil Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan**	**42 Dokumen**	**14 Dokumen**	**14 Dokumen**	**14 Dokumen**	**100,00 %**	**14 Dokumen**	**28 Dokumen**	**66,67%**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (Kondisi Awal)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (tahun berjalan)	
						Target	Realisasi	Capaian %		Realisasi Capaian Program Kegiatan s.d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian %
1	*2*	*3*		*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10*	*11=(10/4)*
		Hasil :	**Persentase pemenuhan pemeliharaan TMP**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100,00 %**	**100 Persen**	**67 Persen**	**66,67%**
1.06.07.2.01.01	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Keluaran :	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	1 Dokumen	2 Dokumen	66,67%
1.06.07.2.01.02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Keluaran :	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	3 Makam	1 Makam	1 Makam	1 Makam	100,00%	1 Makam	2 Makam	66,67%
1.06.07.2.01.03	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Keluaran :	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	36 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100,00%	12 Laporan	24 Laporan	66,67%
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Capaian Program :**	**Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100,00 %**	**100 Persen**	**67 Persen**	**66,67%**
1.06.01.2.01	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Keluaran :**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**30 Dokumen**	**11 Dokumen**	**10 Dokumen**	**10 Dokumen**	**100,00 %**	**11 Dokumen**	**21 Dokumen**	**70,00%**
		Hasil :	**Persentase Ketersediaan Dokumen perencanaan dan Pelaporan**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100,00 %**	**100 Persen**	**67 Persen**	**66,67%**
1.06.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Keluaran :	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18 Dokumen	7 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	100,00%	7 Dokumen	13 Dokumen	72,22%
1.06.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Keluaran :	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100,00%	1 Laporan	2 Laporan	66,67%
1.06.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Keluaran :	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100,00%	3 Laporan	6 Laporan	66,67%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (Kondisi Awal)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (tahun berjalan)	
						Target	Realisasi	Capaian %		Realisasi Capaian Program Kegiatan s.d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian %
1	*2*	*3*		*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10*	*11=(10/4)*
1.06.01.2.02	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Keluaran :**	**Jumlah dokumen dokumen adminstrasi keuangan**	**45 Dokumen**	**13 Dokumen**	**15 Dokumen**	**15 Dokumen**	**100,00 %**	**23 Dokumen**	**38 Dokumen**	**84,44%**
		Hasil :	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100,00 %**	**100 Persen**	**67 Persen**	**66,67%**
1.06.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Keluaran :	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	135 Orang/Bulan	41 Orang/Bulan	45 Orang/Bulan	45 Orang/Bulan	100,00%	45 Orang/Bulan	90 Orang/Bulan	66,67%
1.06.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Keluaran :	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 Laporan	0 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100,00%	6 Laporan	7 Laporan	233,33%
1.06.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Keluaran :	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100,00%	4 Laporan	5 Laporan	166,67%
1.06.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Keluaran :	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	3 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	1 Dokumen	2 Dokumen	66,67%
1.06.01.2.03	**Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Keluaran :**	**Jumlah dokumen dokumen Barang Milik Daerah**	**12 Dokumen**	**0 Dokumen**	**4 Dokumen**	**4 Dokumen**	**100,00 %**	**4 Dokumen**	**8 Dokumen**	**66,67%**
		Hasil :	**Persentase Ketersediaan Dokumen Laporan Barang Milik Daerah**	**100 Persen**	**0 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100,00 %**	**100 Persen**	**67 Persen**	**66,67%**
1.06.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Keluaran :	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	0 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100,00%	4 Dokumen	8 Dokumen	66,67%
1.06.01.2.05	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Keluaran :**	**Jumlah dokumen Pembinaan Pegawai**	**6 Dokumen**	**2 Dokumen**	**2 Dokumen**	**2 Dokumen**	**100,00 %**	**2 Dokumen**	**4 Dokumen**	**66,67%**
		Hasil :	**Prosentase aparatur yang meningkat kapasitasnya**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100,00 %**	**100 Persen**	**67 Persen**	**66,67%**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (Kondisi Awal)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (tahun berjalan)	
						Target	Realisasi	Capaian %		Realisasi Capaian Program Kegiatan s.d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian %
1	*2*	*3*		*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10*	*11=(10/4)*
1.06.01.2.05.09	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Keluaran :	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	180 Paket	60 Paket	0 Paket	0 Paket	0,00%	60 Paket	60 Paket	66,67%
1.06.01.2.05.02	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Keluaran :	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	180 Orang	60 Orang	60 Orang	60 Orang	100,00%	60 Orang	120 Orang	66,67%
1.06.01.2.06	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Keluaran :**	**Jumlah dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**21 Dokumen**	**7 Dokumen**	**7 Dokumen**	**7 Dokumen**	**100,00 %**	**7 Dokumen**	**14 Dokumen**	**66,67%**
		Hasil :	**Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100 Pesen**	**100 Pesen**	**100 Pesen**	**100 Pesen**	**100,00 %**	**100 Pesen**	**67 Persen**	**66,67%**
1.06.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Keluaran :	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	33 Paket	5 Paket	8 Paket	8 Paket	100,00%	5 Paket	13 Paket	39,39%
1.06.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Keluaran :	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	58 Paket	11 Paket	23 Paket	23 Paket	100,00%	29 Paket	52 Paket	89,66%
1.06.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Keluaran :	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	60 Paket	15 Paket	15 Paket	15 Paket	100,00%	28 Paket	43 Paket	71,67%
1.06.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Keluaran :	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	135 Paket	39 Paket	40 Paket	40 Paket	100,00%	32 Paket	72 Paket	53,33%
1.06.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Keluaran :	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	32 Paket	6 Paket	7 Paket	7 Paket	100,00%	8 Paket	15 Paket	46,88%
1.06.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Keluaran :	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	36 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100,00%	12 Laporan	24 Laporan	66,67%
1.06.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Keluaran :	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100,00%	12 Laporan	24 Laporan	66,67%
1.06.01.2.08	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Keluaran :**	**Jumlah dokumen Jasa Penunjang**	**36 Dokumen**	**12 Dokumen**	**12 Dokumen**	**12 Dokumen**	**100,00 %**	**12 Dokumen**	**24 Dokumen**	**66,67%**
		Hasil :	**Persentase pemenuhan Jasa Penunjang**	**100 Pesen**	**100 Pesen**	**100 Pesen**	**100 Pesen**	**100,00 %**	**100 Pesen**	**67 Persen**	**66,67%**
1.06.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Keluaran :	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	36 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100,00%	12 Laporan	24 Laporan	66,67%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (Kondisi Awal)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (tahun berjalan)	
						Target	Realisasi	Capaian %		Realisasi Capaian Program Kegiatan s.d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian %
1	*2*	*3*		*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10*	*11=(10/4)*
1.06.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Keluaran :	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100,00%	12 Laporan	24 Laporan	66,67%
1.06.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Keluaran :	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100,00%	12 Laporan	24 Laporan	66,67%
1.06.01.2.09	**Kegiatan :Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Keluaran :**	**Jumlah dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**	**36 Dokumen**	**12 Dokumen**	**12 Dokumen**	**12 Dokumen**	**100,00 %**	**12 Dokumen**	**24 Dokumen**	**66,67%**
		Hasil :	**Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100,00 %**	**100 Persen**	**67 Persen**	**66,67%**
1.06.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Keluaran :	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	75 Unit	22 Unit	25 Unit	25 Unit	100,00%	46 Unit	71 Unit	94,67%
1.06.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Keluaran :	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	130 Unit	38 Unit	40 Unit	40 Unit	100,00%	32 Unit	72 Unit	55,38%
1.06.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Keluaran :	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100,00%	1 Unit	2 Unit	66,67%

Berdasarkan tabel diatas evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Sosial terhadap Renstra Dinas Sosial Tahun 2025 -2029 masih terdapat kegiatan yang perkiran capaian kinerjanya dibawah 50% (*dilihat dari kolom 11) diantaranya :

1. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal dan Sub Kegiatan Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal masih 36,66%. **Faktor penghambat** kegiatan ini yaitu bersifat kasuistik. **Solusi** dari kegiatan ini yaitu dilakukan koordinasi tingkat lanjut dengan stakeholder terkait serta melakukan perubahan target maupun anggaran pada APBD-P;
2. Program Rehabilitasi Sosial Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial terdiri dari sub kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar kinerjanya masih 39,33%. **Faktor penghambat** kegiatan ini yaitu bersifat kasuistik. **Solusi** dari kegiatan ini yaitu optimalisasi pelaksanaan kegiatan di ABPD-P;
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan dan Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan. **Faktor penghambat** kegiatan ini yaitu penyesuaian anggaran dan kebutuhan.
4. Faktor penghabat lainnya yaitu :
    - Belum Optimalnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan Publik;
    - Belum optimalnya pengelolaan data penerima bantuan iurtan BPJS Ketenagakerjaan;
    - Adanya refocusing dan efisiensi belanja pada tahun berjalan.
5. Rekomendasi lainya yaitu melakukan koordinasi secara insentif baik dengan lintas opd dalam rangka pemenuhan sarana dan prasarana penunjang tersebut.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan

Dinas Sosial Kabupaten Tangerang mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan urusan sosial. Dalam Peraturan Bupati nomor 8 Tahun 2023 tentang kedudukan, susunan organisasi tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Sosial Kabupaten Tangerang

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Dinas Sosial menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang sosial;

b. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan

dan pelayanan umum bidang sosial;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Tangerang didasarkan pada kajian capaian kinerja pelayanan sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis 2024-2026, disajikan pada tabel, sebagai berikut :

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Tangerang Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian		Proyeksi	Catatan Analisis
				2024	2025	2026	2024	2025 Triwulan I	2026	
1	2	3	4	5	9	7	8	9	10	11
INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH										
1	Persentase PPKS yang Berdaya			1,44%	1,69%	1,87%	1,48%	0,57%	1,87%	
INDIKATOR KINERJA PENUNJANG PERANGKAT DAERAH										
2	Nilai AKIP Dinas Sosial			83,10	83,30	83,50	88,90	-	83,50	
3	Persentase pemenuhan pemeliharaan TMP			80%	85%	90%	80,00%	24,29%	90%	
STANDAR PELAYANAN MINIMAL DAN IKK										
4	Presentase Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Sosial	√		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	13,09%	100,00%	
5	Presentase Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Sosial	√		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	70,95%	100,00%	
6	Presentase Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial	√		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	10,34%	100,00%	
7	Presentase Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	√		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	9,90-%	100,00%	
8	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kenutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/Kota	√	√	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	13,55%	100,00%	
9	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak		√	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	23,57%	100,00%	

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian		Proyeksi	Catatan Analisis
				2024	2025	2026	2024	2025 Triwulan I	2026	
1	2	3	4	5	9	7	8	9	10	11
	terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemisyang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti									
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL										
11	Persentase PSKS yang meningkat perannya dalam usaha kesejahteraan sosial			76,87%	80,35%	83,82%	76,87%	2,46%	83,82%	
PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN										
12	Presentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Yang Mendapatkan Penanganan			33,33%	33,33%	33,34%	3,33%	0,00%	33,34%	
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL										
14	Persentase PPKS yang mendapatkan rehabilitasi sosial			29,96%	32,70%	37,33%	30,05%	9,64%	37,33%	
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL										
16	Persentase masyarakat miskin yg mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial			100,00%	100,00%	100,00%	105,73%	37,75%	100,00%	
PROGRAM PENANGANAN BENCANA										
17	Prosentase Terpenuhinya kebutuhan dasar Korban Bencana alam dan sosial pada saat tanggap darurat bencana daerah /kota			100%	100%	100%	100,00%	19,70%	100%	
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN										

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian		Proyeksi	Catatan Analisis
				2024	2025	2026	2024	2025 Triwulan I	2026	
1	2	3	4	5	9	7	8	9	10	11
18	Prosentase pengelolaan TMP Raden Aria Wangsakara			80,00%	85,00%	90,00%	80,00%	24,29%	90,00%	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										
19	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	38,03%	100,00%	

2.3. ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS FUNGSI SKPD

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Sosial adalah :

1. Masih terbatasnya kuantitas, kualitas dan kompentensi sumber daya manusia yang menangani program dan kegiatan dibidang kesejahteraan sosial;
2. Belum optimalnya sarana dan prasarana penanganan bagi PPKS;
3. Belum optimalnya verifikasi dan validasi pendataan PPKS dan PSKS;
4. Belum Optimalnya Penanganan Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS);
5. Belum Optimalnya Pemerataan Infrastruktur di Lingkungan Taman Makam Pahlawan

Dampak dari permasalahan tersebut dapat menghambat pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah terutama dalam mewujudkan kualitas sumber daya manusia kabupaten tangerang yang mandiri, berdaya saing tinggi dan berakhlak mulia.

Mencermati kondisi tersebut maka menjadi tantangan dan peluang bagi Dinas Sosial dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu Isu strategis bagi Dinas Sosial berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya dapat diidentifikasi sebagai berikut:

a. **Peningkatan Cakupan Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)**, menjadi salah satu isu Strategis Dinas Sosial Kabupaten Tangerang untuk Tahun 2024-2026 karena menggambarkan kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Tangerang dalam penetapan kinerja mengenai peningkatan kesejahteraan masyarakat serta peningkatan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) menjadi berdaya di Kabupaten Tangerang yang diupayakan melalui pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat, penguatan kelembagaan lokal dan aktualisasi potensi sumber kesejahteraan sosial, peningkatan pengolahan data PPKS dan PSKS, terjaminnya perlindungan sosial, serta terpenuhinya kebutuhan dasar bagi PPKS di Kabupaten Tangerang;

b. **Optimalisasi kualitas SDM**, pada Bidang Sosial dalam rangka pengkatan kemampuan dan kapasitas SDM Aparatur serta daya dukung sarana dan prasaraba yang memadai diperlukan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan yang berkelanjutan dan berbasis kinerja, peningkatan keahlian, disiplin dan etos kerja apparat, peningkatan

dukungan prasarana dan sarana kerja yang memadai dan berkualitas serta peningkatan dukungan data dan informasi secara lengkap, benar dan mutakhir.
Selain kedua isu tersebut, Isu-isu yang berkembang dan dikaitkan dengan Dinas Sosial seiring berjalannya waktu yaitu:

1. Data Kemiskinan
2. Kemiskinan Ekstrim
3. Penanganan Stunting
4. Penanganan inflasi

Upaya-upaya yang akan dilakukan Dinas Sosial dalam menangani isu-isu tersebut setra dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran maka Dinas Sosial Kabupaten Tangerang merumuskan kebijakan-kebijakan strategis melalui 7 Program yaitu :

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- Program Pemberdayaan Sosial;
- Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan;
- Program Rehabilitasi Sosial;
- Program Penanganan Bencana;
- Program Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL PERUBAHAN RKPD;

Berdasarkan Rancangan awal Perubahan RKPD serta memperhatikan sasaran dan prioritas pembangunan, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja, serta pagu indikatif Perangkat Daerah, dipeperlukan penijauan kembali terhadap Rancangan Awal dengan Analisis kebutuhan sebagai bentuk dari proses penyempurnaan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Dinas Sosial Kabupaten Tangerang telah melakukan telaahan terhadap Rancangan Awal Peruabahan RKPD dapat dilihat pada Tabel di bawah berikut ini :

Tabel 2. 5
Review terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD Tahun 2025
Dinas Sosial Kabupaten Tangerang

RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN							HASIL ANALISA KEBUTUHAN						Ket
Kode Rekening'	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Kab.Tangerang**	**Capaian Program :**	**Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan**	**100 Persen**	**14.506.840.534**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kab.Tangerang**	**Capaian Program :**	**Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan**	**100 Persen**	**14.506.840.534**	
1.06.01.2.01	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kab.Tangerang**	**Keluaran :**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**11 Dokumen**	**204.764.000**	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kab.Tangerang**	**Keluaran :**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**11 Dokumen**	**204.764.000**	
		Kab.Tangerang	**Hasil :**	**Persentase Ketersediaan Dokumen perencanaan dan Pelaporan**	**100 Persen**			**Kab.Tangerang**	**Hasil :**	**Persentase Ketersediaan Dokumen perencanaan dan Pelaporan**	**100 Persen**		
1.06.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab.Tangerang	Keluaran :	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	124.767.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab.Tangerang	Keluaran :	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	124.767.000	
1.06.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab.Tangerang	Keluaran :	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	27.479.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab.Tangerang	Keluaran :	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	27.479.000	
1.06.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab.Tangerang	Keluaran :	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	52.518.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab.Tangerang	Keluaran :	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	52.518.000	
1.06.01.2.02	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kab.Tangerang**	**Keluaran :**	**Jumlah dokumen dokumen adminstrasi keuangan**	**23 Dokumen**	**11.071.181.681**	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kab.Tangerang**	**Keluaran :**	**Jumlah dokumen dokumen adminstrasi keuangan**	**23 Dokumen**	**11.071.181.681**	
		Kab.Tangerang	**Hasil :**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100 Persen**			**Kab.Tangerang**	**Hasil :**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100 Persen**		

RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN							HASIL ANALISA KEBUTUHAN						Ket
Kode Rekening	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
1.06.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab.Tangerang	Keluaran :	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45/12 Orang/Bulan	10.984.065.981	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab.Tangerang	Keluaran :	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45/12 Orang/Bulan	10.984.065.981	
1.06.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab.Tangerang	Keluaran :	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6 Laporan	39.892.700	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab.Tangerang	Keluaran :	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6 Laporan	39.892.700	
1.06.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab.Tangerang	Keluaran :	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	37.840.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab.Tangerang	Keluaran :	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	4 Laporan	37.840.000	
1.06.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab.Tangerang	Keluaran :	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	9.383.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab.Tangerang	Keluaran :	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	9.383.000	
1.06.01.2.03	**Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Kab.Tangerang**	**Keluaran :**	**Jumlah dokumen dokumen Barang Milik Daerah**	**4 Dokumen**	**9.796.328**	**Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Kab.Tangerang**	**Keluaran :**	**Jumlah dokumen dokumen Barang Milik Daerah**	**4 Dokumen**	**9.796.328**	
		Kab.Tangerang	**Hasil :**	**Persentase Ketersediaan Dokumen Laporan Barang Milik Daerah**	**100 Persen**			**Kab.Tangerang**	**Hasil :**	**Persentase Ketersediaan Dokumen Laporan Barang Milik Daerah**	**100 Persen**		
1.06.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab.Tangerang	Keluaran :	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen	9.796.328	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab.Tangerang	Keluaran :	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen	**9.796.328**	
1.06.01.2.05	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kab.Tangerang**	**Keluaran :**	**Jumlah dokumen Pembinaan Pegawai**	**60 Dokumen**	**266.921.350**	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kab.Tangerang**	**Keluaran :**	**Jumlah dokumen Pembinaan Pegawai**	**60 Dokumen**	**266.921.350**	
		Kab.Tangerang	**Hasil :**	**Prosentase aparatur yang**	**100 Persen**			**Kab.Tangerang**	**Hasil :**	**Prosentase aparatur yang meningkat kapasitasnya**	**100 Persen**		

RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN							HASIL ANALISA KEBUTUHAN						Ket
Kode Rekening	**Program / Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**		**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program / Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**		**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana**	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
				meningkat kapasitasnya									
1.06.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab.Tangerang	Keluaran :	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	60 Paket	136.898.400		Kab.Tangerang	Keluaran :		60 Orang	136.898.400	
1.06.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab.Tangerang	Keluaran :	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	60 Orang	130.022.950	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab.Tangerang	Keluaran :	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	60 Orang	130.022.950	
1.06.01.2.06	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kab.Tangerang**	**Keluaran :**	**Jumlah dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**7 Dokumen**	**1.206.870.836**	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kab.Tangerang**	**Keluaran :**	**Jumlah dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**7 Dokumen**	**1.206.870.836**	
		Kab.Tangerang	**Hasil :**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100 Pesen**			**Kab.Tangerang**	**Hasil :**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100 Pesen**		
1.06.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Kab.Tangerang	Keluaran :	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	22.585.059	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Kab.Tangerang	Keluaran :	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	22.585.059	
1.06.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab.Tangerang	Keluaran :	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	29 Paket	522.989.985	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab.Tangerang	Keluaran :	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	29 Paket	522.989.985	
1.06.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab.Tangerang	Keluaran :	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	28 Paket	42.446.957	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab.Tangerang	Keluaran :	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	28 Paket	42.446.957	
1.06.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab.Tangerang	Keluaran :	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	32 Paket	103.517.105	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab.Tangerang	Keluaran :	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	32 Paket	103.517.105	
1.06.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab.Tangerang	Keluaran :	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket	41.370.730	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab.Tangerang	Keluaran :	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket	41.370.730	
1.06.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab.Tangerang	Keluaran :	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	77.035.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab.Tangerang	Keluaran :	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	77.035.000	

RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN							HASIL ANALISA KEBUTUHAN						Ket
Kode Rekening	**Program / Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**		**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program / Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**		**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana**	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
1.06.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab.Tangerang	Keluaran :	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	396.926.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab.Tangerang	Keluaran :	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	396.926.000	
1.06.01.2.08	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab.Tangerang**	**Keluaran :**	**Jumlah dokumen Jasa Penunjang**	**12 Dokumen**	**1.110.999.222**	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab.Tangerang**	**Keluaran :**	**Jumlah dokumen Jasa Penunjang**	**12 Dokumen**	**1.110.999.222**	
		Kab.Tangerang	**Hasil :**	**Persentase pemenuhan Jasa Penunjang**	**100 Pesen**			**Kab.Tangerang**	**Hasil :**	**Persentase pemenuhan Jasa Penunjang**	**100 Pesen**		
1.06.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab.Tangerang	Keluaran :	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	132.433.862	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab.Tangerang	Keluaran :	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	132.433.862	
1.06.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab.Tangerang	Keluaran :	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	42.998.292	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab.Tangerang	Keluaran :	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	42.998.292	
1.06.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab.Tangerang	Keluaran :	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	935.567.068	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab.Tangerang	Keluaran :	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	935.567.068	
1.06.01.2.09	**Kegiatan :Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab.Tangerang**	**Keluaran :**	**Jumlah dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**	**12 Dokumen**	**636.307.117**	**Kegiatan :Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab.Tangerang**	**Keluaran :**	**Jumlah dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**	**12 Dokumen**	**636.307.117**	
		Kab.Tangerang	**Hasil :**	**Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	**100 Persen**			**Kab.Tangerang**	**Hasil :**	**Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	**100 Persen**		
1.06.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab.Tangerang	Keluaran :	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	46 Unit	433.462.117	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab.Tangerang	Keluaran :	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	46 Unit	433.462.117	
1.06.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab.Tangerang	Keluaran :	Jumlah Peralatan dan Mesin	32 Unit	39.750.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab.Tangerang	Keluaran :	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	32 Unit	39.750.000	

RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN							HASIL ANALISA KEBUTUHAN						Ket
Kode Rekening	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
				Lainnya yang Dipelihara									
1.06.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab.Tangerang	Keluaran :	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	163.095.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab.Tangerang	Keluaran :	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	163.095.000	
								Kab.Tangerang					
1.06.02	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**Kab.Tangerang**	**Capaian Program :**	**Persentase PSKS yang meningkat perannya dalam usaha kesejahteraan sosial**	**100,00 Persen**	**4.407.685.330**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**Kab.Tangerang**	**Capaian Program :**	**Persentase PSKS yang meningkat perannya dalam usaha kesejahteraan sosial**	**100,00 Persen**	**4.407.685.330**	
1.06.02.2.02	**Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab.Tangerang**	**Keluaran :**	**Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang**	**20 Dokumen**	**37.280.400**	**Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab.Tangerang**	**Keluaran :**	**Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang**	**20 Dokumen**	**37.280.400**	
		Kab.Tangerang	**Hasil :**	**Persentase Dunia Usaha yang meningkat perannya dalam usaha kesejahteraan sosial**				**Kab.Tangerang**	**Hasil :**	**Persentase Dunia Usaha yang meningkat perannya dalam usaha kesejahteraan sosial**			
1.06.02.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Kab.Tangerang	Keluaran :	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	20 Dokumen	**37.280.400**	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Kab.Tangerang	Keluaran :	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	20 Dokumen	**37.280.400**	
1.06.02.2.03	**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab.Tangerang**	**Keluaran :**	**Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang meningkat kapasitasnya**	**1177 Orang**	**4.370.404.930**	**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab.Tangerang**	**Keluaran :**	**Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang meningkat kapasitasnya**	**1157 Orang**	**4.370.404.930**	
		Kab.Tangerang	**Hasil :**	**Persentase PSKS yang meningkat**				**Kab.Tangerang**	**Hasil :**	**Persentase PSKS yang meningkat**			

RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN							HASIL ANALISA KEBUTUHAN						Ket
Kode Rekening	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
				perannya dalam usaha kesejahteraan sosial						**perannya dalam usaha kesejahteraan sosial**			
1.06.02.2.03.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Tangerang	Keluaran :	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	368 Orang	219.417.450	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Tangerang	Keluaran :	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	368 Orang	219.417.450	
1.06.02.2.03.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Tangerang	Keluaran :	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	29 Orang	222.424.400	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Tangerang	Keluaran :	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	29 Orang	222.424.400	
1.06.02.2.03.03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Tangerang	Keluaran :	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	700 Keluarga	3.511.003.000	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Tangerang	Keluaran :	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	700 Keluarga	3.511.003.000	
1.06.02.2.03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Tangerang	Keluaran :	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	60 Lembaga	379.491.700	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Tangerang	Keluaran :	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	60 Lembaga	379.491.700	
1.06.02.2.03.05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Kab.Tangerang	Keluaran :	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Sertifikat	38.068.380					3 Lembaga	38.068.380	
1.06.03	**PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN**	**Kab.Tangerang**	**Capaian Program :**	**Prosentase Warga Negara Migran Korban Tindak**	**33,33 Persen**	**14.319.400**	**PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA**	**Kab.Tangerang**	**Capaian Program :**	**Prosentase Warga Negara Migran Korban Tindak**	**33,33 Persen**	**14.319.400**	

RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN							HASIL ANALISA KEBUTUHAN						Ket
Kode Rekening	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
	KORBAN TINDAK KEKERASAN			**Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan**			**MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN**			**Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan**			
1.06.03.2.01	**Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal**	**Kab.Tangerang**	**Keluaran :**	**Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota**	**10 Orang**	**14.319.400**	**Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal**	**Kab.Tangerang**	**Keluaran :**	**Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota**	**10 Orang**	**14.319.400**	
		Kab.Tangerang	**Hasil :**	**Prosentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan**	**33,33 Persen**			**Kab.Tangerang**	**Hasil :**	**Prosentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan**	**33,33 Persen**		
1.06.03.2.01.01	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Kab.Tangerang	Keluaran :	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	14.319.400	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Kab.Tangerang	Keluaran :	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	14.319.400	
1.06.04	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**Kab.Tangerang**	**Capaian Program :**	**Persentase PPKS yang mendapatkan rehabilitasi sosial**	**63,11 Persen**	**2.549.237.784**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**Kab.Tangerang**	**Capaian Program :**	**Persentase PPKS yang mendapatkan rehabilitasi sosial**	**36,11 Persen**	**2.549.237.784**	
1.06.04.2.01	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**	**Kab.Tangerang**	**Keluaran :**	**Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis di Luar Panti Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya**	**1836 Orang**	**2.388.456.109**	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**	**Kab.Tangerang**	**Keluaran :**	**Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis di Luar Panti Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya**	**1836 Orang**	**2.388.456.109**	

RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN							HASIL ANALISA KEBUTUHAN						Ket
Kode Rekening'	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
		Kab.Tangerang	**Hasil :**	**Peresentase Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar dan gelandangan pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial**	**31,26 Persen**			**Kab.Tangerang**	**Hasil :**	**Peresentase Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar dan gelandangan pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial**	**31,26 Persen**		
1.06.04.2.01.01	Penyediaan Permakanan	Kab.Tangerang	Keluaran :	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	350 Orang	340.058.500	Penyediaan Permakanan	Kab.Tangerang	Keluaran :	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	350 Orang	340.058.500	
1.06.04.2.01.02	Penyediaan Sandang	Kab.Tangerang	Keluaran :	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	350 Orang	177.349.000	Penyediaan Sandang	Kab.Tangerang	Keluaran :	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	350 Orang	177.349.000	
1.06.04.2.01.03	Penyediaan Alat Bantu	Kab.Tangerang	Keluaran :	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	350 Orang	750.008.000	Penyediaan Alat Bantu	Kab.Tangerang	Keluaran :	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	350 Orang	750.008.000	
1.06.04.2.01.04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Kab.Tangerang	Keluaran :	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	93 Orang	201.279.400	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Kab.Tangerang	Keluaran :	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	93 Orang	201.279.400	
1.06.04.2.01.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kab.Tangerang	Keluaran :	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	160 Orang	549.759.209	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kab.Tangerang	Keluaran :	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	160 Orang	549.759.209	

RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN							HASIL ANALISA KEBUTUHAN						Ket
Kode Rekening'	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
1.06.04.2.01.06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Kab.Tangerang	Keluaran :	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	146.215.200	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Kab.Tangerang	Keluaran :	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	146.215.200	
1.06.04.2.01.07	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Kab.Tangerang	Keluaran :	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	70 Orang	9.518.800	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Kab.Tangerang	Keluaran :	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	70 Orang	9.518.800	
1.06.04.2.01.08	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Kab.Tangerang	Keluaran :	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	22.163.400	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Kab.Tangerang	Keluaran :	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	22.163.400	
1.06.04.2.01.09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Kab.Tangerang	Keluaran :	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	35 Orang	10.328.800	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Kab.Tangerang	Keluaran :	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	35 Orang	10.328.800	
1.06.04.2.01.10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Kab.Tangerang	Keluaran :	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	185 Orang	134.937.000	Pemberian Layanan Kedaruratan	Kab.Tangerang	Keluaran :	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	185 Orang	134.937.000	

RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN							HASIL ANALISA KEBUTUHAN						Ket
Kode Rekening	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
1.06.04.2.01.11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Kab.Tangerang	Keluaran :	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	72 Orang	38.400.000	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Kab.Tangerang	Keluaran :	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	72 Orang	38.400.000	
1.06.04.2.01.12	Pemberian Layanan Rujukan	Kab.Tangerang	Keluaran :	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayaanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	41 Orang	8.438.800	Pemberian Layanan Rujukan	Kab.Tangerang	Keluaran :	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayaanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	41 Orang	8.438.800	
1.06.04.2.02	**Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**	**Kab.Tangerang**	**Keluaran :**	**Jumlah PPKS Lainnya yang bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang mendapatkan rehabilitasi sosial**	**285 Orang**	**160.781.675**	**Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**	**Kab.Tangerang**	**Keluaran :**	**Jumlah PPKS Lainnya yang bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang mendapatkan rehabilitasi sosial**	**285 Orang**	**160.781.675**	
		Kab.Tangerang	**Hasil :**	**Peresentase PPKS Lainnya yang bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yangmendapatkan rehabilitasi sosial**	**4,85 Persen**			**Kab.Tangerang**	**Hasil :**	**Peresentase PPKS Lainnya yang bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yangmendapatkan rehabilitasi sosial**	**4,85 Persen**		
1.06.04.2.02.06	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Kab.Tangerang	Keluaran :	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	55 Orang	58.733.875	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Kab.Tangerang	Keluaran :	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	55 Orang	58.733.875	
1.06.04.2.02.07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kab.Tangerang	Keluaran :	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	128 Orang	41.650.000	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kab.Tangerang	Keluaran :	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	128 Orang	41.650.000	
1.06.04.2.02.12	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Kab.Tangerang	Keluaran :	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga	72 Orang	39.098.800	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Kab.Tangerang	Keluaran :	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga	72 Orang	39.098.800	

RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN							HASIL ANALISA KEBUTUHAN						Ket
Kode Rekening	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
				Kewenangan Kabupaten/Kota						Kewenangan Kabupaten/Kota			
1.06.04.2.02.14	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Kab.Tangerang	Keluaran :	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	10 Dokumen	21.299.000	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Kab.Tangerang	Keluaran :	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	10 Dokumen	21.299.000	
1.06.05	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**Kab.Tangerang**	**Capaian Program :**	**Persentase masyarakat miskin yg mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial**	**100 Persen**	**52.947.463.920**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**Kab.Tangerang**	**Capaian Program :**	**Persentase masyarakat miskin yg mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial**	**100 Persen**	**52.947.463.920**	
1.06.05.2.02	**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab.Tangerang**	**Keluaran :**	**Jumlah Masyarakat Miskin yang mendapatkan perlindungan jaminan sosial**	**628850 Orang**	**52.947.463.920**	**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab.Tangerang**	**Keluaran :**	**Jumlah Masyarakat Miskin yang mendapatkan perlindungan jaminan sosial**	**628850 Orang**	**52.947.463.920**	
		Kab.Tangerang	**Hasil :**	**Persentase Pemenuhan Perlindungan Jaminan Sosial**	**100 Persen**			**Kab.Tangerang**	**Hasil :**	**Persentase Pemenuhan Perlindungan Jaminan Sosial**	**100 Persen**		
1.06.05.2.02.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Tangerang	Keluaran :	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	123300 Orang	1.455.323.800	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Tangerang	Keluaran :	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	123300 Orang	1.455.323.800	
1.06.05.2.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Tangerang	Keluaran :	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	500000 Keluarga	45.217.404.120	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Tangerang	Keluaran :	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	500000 Keluarga	45.217.404.120	
1.06.05.2.02.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Kab.Tangerang	Keluaran :	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	5150 Keluarga	5.408.334.000	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Kab.Tangerang	Keluaran :	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	5150 Keluarga	5.408.334.000	
1.06.05.2.02.04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Kab.Tangerang	Keluaran :	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan	400 Orang	866.402.000	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Kab.Tangerang	Keluaran :	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan	400 Orang	866.402.000	

RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN							HASIL ANALISA KEBUTUHAN						Ket
Kode Rekening	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
				Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota						Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota			
1.06.06	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**Kab.Tangerang**	**Capaian Program :**	**Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten/Kota**	**100 Persen**	**1.278.314.000**	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**Kab.Tangerang**	**Capaian Program :**	**Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten/Kota**	**100 Persen**	**1.278.314.000**	
1.06.06.2.01	**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**	**Kab.Tangerang**	**Keluaran :**	**Jumlah Orang/Kelompok yang mendapatkan perlindungan sosial**	**3300 Orang**	**987.281.000**	**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**	**Kab.Tangerang**	**Keluaran :**	**Jumlah Orang/Kelompok yang mendapatkan perlindungan sosial**	**3300 Orang**	**987.281.000**	
		Kab.Tangerang	**Hasil :**	**Persentase Cakupan Penanganan Perlindungan Sosial bagi Korban Bencana Alam dan Sosial**	**100 Persen**			**Kab.Tangerang**	**Hasil :**	**Persentase Cakupan Penanganan Perlindungan Sosial bagi Korban Bencana Alam dan Sosial**	**100 Persen**		
1.06.06.2.01.01	Penyediaan Makanan	Kab.Tangerang	Keluaran :	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	3300 Orang	701.983.000	Penyediaan Makanan	Kab.Tangerang	Keluaran :	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	3300 Orang	701.983.000	
1.06.06.2.01.02	Penyediaan Sandang	Kab.Tangerang	Keluaran :	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	650 Orang	249.800.000	Penyediaan Sandang	Kab.Tangerang	Keluaran :	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	650 Orang	249.800.000	

RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN							HASIL ANALISA KEBUTUHAN						Ket
Kode Rekening'	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
1.06.06.2.01.03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Kab.Tangerang	Keluaran :	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Unit	6.260.000	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Kab.Tangerang	Keluaran :	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Unit	6.260.000	
1.06.06.2.01.04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Kab.Tangerang	Keluaran :	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	65 Orang	18.446.000	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Kab.Tangerang	Keluaran :	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	65 Orang	18.446.000	
1.06.06.2.01.05	Pelayanan Dukungan Psikososial	Kab.Tangerang	Keluaran :	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	65 Orang	10.792.000	Pelayanan Dukungan Psikososial	Kab.Tangerang	Keluaran :	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	65 Orang	10.792.000	
1.06.06.2.02	**Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota**	**Kab.Tangerang**	**Keluaran :**	**Jumlah Item Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota**	**2 Item**	**291.033.000**	**Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota**	**Kab.Tangerang**	**Keluaran :**	**Jumlah Item Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota**	**2 Item**	**291.033.000**	
		Kab.Tangerang	**Hasil :**	**Prosentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana**	**100 Persen**			**Kab.Tangerang**	**Hasil :**	**Prosentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana**	**100 Persen**		
1.06.06.2.02.01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Kab.Tangerang	Keluaran :	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Kampung	171.228.000	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Kab.Tangerang	Keluaran :	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Kampung	171.228.000	
1.06.06.2.02.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Kab.Tangerang	Keluaran :	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan	150 Orang	119.805.000	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Kab.Tangerang	Keluaran :	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna	150 Orang	119.805.000	

RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN							HASIL ANALISA KEBUTUHAN						Ket
Kode Rekening	**Program / Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**		**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program / Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**		**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana**	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
				Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota						Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota			
1.06.07	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	**Kab.Tangerang**	**Capaian Program :**	**Persentase pemenuhan pemeliharaan TMP**	**85 Persen**	**239.167.400**	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	**Kab.Tangerang**	**Capaian Program :**	**Persentase pemenuhan pemeliharaan TMP**	**85 Persen**	**239.167.400**	
1.06.07.2.01	**Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota**	**Kab.Tangerang**	**Keluaran :**	**Jumlah Dokumen dan Laporan Hasil Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan**	**14 Dokumen**	**239.167.400**	**Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota**	**Kab.Tangerang**	**Keluaran :**	**Jumlah Dokumen dan Laporan Hasil Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan**	**14 Dokumen**	**239.167.400**	
		Kab.Tangerang	**Hasil :**	**Persentase pemenuhan pemeliharaan TMP**	**85 Persen**			**Kab.Tangerang**	**Hasil :**	**Persentase pemenuhan pemeliharaan TMP**	**85 Persen**		
1.06.07.2.01.01	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kab.Tangerang	Keluaran :	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1 Dokumen	43.530.100	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kab.Tangerang	Keluaran :	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1 Dokumen	43.530.100	
1.06.07.2.01.02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kab.Tangerang	Keluaran :	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	1 Makam	154.513.300	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kab.Tangerang	Keluaran :	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	1 Makam	154.513.300	
1.06.07.2.01.03	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kab.Tangerang	Keluaran :	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	12 Laporan	41.124.000	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kab.Tangerang	Keluaran :	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	12 Laporan	41.124.000	
JUMLAH						**75.943.028.368**						**75.943.028.368**	

Berdasarkan tabel diatas rancangan awal perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) terdapat 1 program 1 kegiatan dan yang targetnya berbeda yaitu Program Rehabilitasi Sosial Kegitatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial dimana pada rancangan awal target capaian kinerja sebesar 63,11 Persen dan pada rancangan akhir berubah menjadi 36,11 Persen. Sedangkan pada kegiatan

Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota pada rancangan awal target kinerja sebanyak 1177 Orang dan pada rancangan akhir sebanya 1157 Orang. perubahan tersebut terjadi karena adanya keselahan pada system SIPD yang tidak bisa melakukan editing pada saat proses input berlangsung sehingga perlu adanya perbaikan pada tahap selanjutnya atau pada saat penyusunan penganggaran

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perubahan Rencana kerja Dinas Sosial Kabupaten Tangerang Tahun 2025 mengurai Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan, indikator kinerja, target capaian kinerja, pagu anggaran, kebutuhan dana/pagu undikatif serta perubahan atau pergeseran yang terjadi yang disesuaikan dengan kebutuhan.

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan adalah adanya Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan juga orientasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Tangerang serta pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

3.1. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Pada Tahun 2025 ini Dinas Sosial Kabupaten Tangerang dan seluruh perangkat Daerah di Kabupaten Tangerang melaksankan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang dalam hal ini Dinas Sosial Kabupaten Tangerang melakukan efisiensi sesuai dengan ketentuan yaitu :

- Efisiensi Belanja Perjalanan Dinas;
- Efisiensi Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Bahan Cetak;
- Efisiensi Belanja Makanan dan Minuman Rapat;
- Efisiensi Belanja Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia;
- Efisiensi Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan;
- Efisiensi Belanja Sewa Hotel.

Data perubahan hasil rasionalisasi dapat dijelaskan pada table di bawah ini :

Tabel. 3.1
Perubahan Rencana Kerja serta Rincian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan hasil Efisiensi/Refocusing

Kode Rekening	Uraian	Indikator		Satuan	SEBELUM		SESUDAH		BERTAMBAH/ BERKURANG
					TARGET	PAGU ANGGARAN	TARGET	PAGU ANGGARAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	8 = (9-7)
ALOKASI BELANJA KEGIATAN									
1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**					**69.268.354.563**		**76.166.823.382**	**6.898.468.819**
1.06.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA**	**Capaian Program :**	**Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan**	**Persen**	**100**	**15.249.164.408**	**100**	**14.735.435.548**	**(513.728.860)**
1.06.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Keluaran :**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Dokumen**	**11**	**251.906.000**	**11**	**204.764.000**	**(47.142.000)**
		Hasil :	**Persentase Ketersediaan Dokumen perencanaan dan Pelaporan**	**Persen**	**100**		**100**		**-**
1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Keluaran :	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	7	152.871.000	7	124.767.000	(28.104.000)
1.06.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Keluaran :	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	34.341.000	1	27.479.000	(6.862.000)
1.06.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Keluaran :	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	3	64.694.000	3	52.518.000	(12.176.000)
1.06.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Keluaran :**	**Jumlah dokumen dokumen adminstrasi keuangan**	**Dokumen**	**23**	**11.390.923.695**	**23**	**11.362.176.695**	**(28.747.000)**
		Hasil :	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**		**100**		**-**
1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Keluaran :	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	45/12	11.275.060.995	45/12	11.275.060.995	-
1.06.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Keluaran :	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	6	51.476.700	6	39.892.700	(11.584.000)
1.06.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Keluaran :	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	4	51.316.000	4	37.840.000	(13.476.000)
1.06.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Keluaran :	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1	13.070.000	1	9.383.000	(3.687.000)

Kode Rekening	Uraian	Indikator		Satuan	SEBELUM		SESUDAH		BERTAMBAH/ BERKURANG
					TARGET	PAGU ANGGARAN	TARGET	PAGU ANGGARAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	8 = (9-7)
1.06.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Keluaran :**	**Jumlah dokumen dokumen Barang Milik Daerah**	**Dokumen**	**4**	**12.895.104**	**4**	**9.796.328**	**(3.098.776)**
		Hasil :	**Persentase Ketersediaan Dokumen Laporan Barang Milik Daerah**	**Persen**	**100**		**100**		**-**
1.06.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Keluaran :	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	4	12.895.104	4	9.796.328	(3.098.776)
1.06.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Keluaran :**	**Jumlah dokumen Pembinaan Pegawai**	**Dokumen**	**2**	**287.353.600**	**2**	**266.921.350**	**(20.432.250)**
		Hasil :	**Prosentase aparatur yang meningkat kapasitasnya**	**Persen**	**100**		**100**		**-**
1.06.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Keluaran :	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	60	136.898.400	60	136.898.400	-
1.06.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Keluaran :	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	60	150.455.200	60	130.022.950	(20.432.250)
1.06.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Keluaran :**	**Jumlah dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Dokumen**	**7**	**1.614.239.216**	**7**	**1.206.870.836**	**(407.368.380)**
		Hasil :	**Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**		**100**		**-**
1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasirnnListrik/Penerangan Bangunan Kantor	Keluaran :	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5	22.585.059	5	22.585.059	-
1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Keluaran :	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	29	526.436.535	29	522.989.985	(3.446.550)
1.06.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Keluaran :	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	28	42.446.957	28	42.446.957	-
1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Keluaran :	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	32	103.517.105	32	103.517.105	-
1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Keluaran :	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	8	55.193.560	8	41.370.730	(13.822.830)
1.06.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Keluaran :	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	98.570.000	12	77.035.000	(21.535.000)
1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Keluaran :	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	765.490.000	12	396.926.000	(368.564.000)
1.06.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Keluaran :**	**Jumlah dokumen Jasa Penunjang**	**Dokumen**	**12**	**1.055.539.676**	**12**	**1.048.599.222**	**(6.940.454)**
		Hasil :	**Persentase pemenuhan Jasa Penunjang**	**Persen**	**100**		**100**		**-**
1.06.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Keluaran :	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	132.495.816	12	132.433.862	(61.954)
1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Keluaran :	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	42.998.292	12	42.998.292	-

Kode Rekening	Uraian	Indikator		Satuan	SEBELUM		SESUDAH		BERTAMBAH/ BERKURANG
					TARGET	PAGU ANGGARAN	TARGET	PAGU ANGGARAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	8 = (9-7)
1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Keluaran :	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	880.045.568	12	873.167.068	(6.878.500)
1.06.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Keluaran :**	**Jumlah dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**	**Dokumen**	**12**	**636.307.117**	**12**	**636.307.117**	**-**
		Hasil :	**Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	**Persen**	**100**		**100**		**-**
1.06.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Keluaran :	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	46	433.462.117	46	433.462.117	-
1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Keluaran :	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	32	39.750.000	32	39.750.000	-
1.06.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Keluaran :	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	163.095.000	1	163.095.000	-
1.06.02	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**Capaian Program :**	**Persentase PSKS yang meningkat perannya dalam usaha kesejahteraan sosial**	**Persen**	**100,00%**	**3.564.723.350**	**100,00%**	**4.407.685.330**	**842.961.980**
1.06.02.2.02	**Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Keluaran :**	**Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang**	**Dokumen**	**20**	**45.240.500**	**20**	**37.280.400**	**(7.960.100)**
		Hasil :	**Persentase Dunia Usaha yang meningkat perannya dalam usaha kesejahteraan sosial**	**Persen**	**2,05%**		**1,70%**		**-**
1.06.02.2.02.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Keluaran :	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Dokumen	20	45.240.500	20	37.280.400	(7.960.100)
1.06.02.2.03	**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**	**Keluaran :**	**Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang meningkat kapasitasnya**	**PSKS**	**957**	**3.519.482.850**	**1157**	**4.370.404.930**	**850.922.080**
		Hasil :	**Persentase PSKS yang meningkat perannya dalam usaha kesejahteraan sosial**	**Persen**	**97,95%**		**98,30%**		**-**
1.06.02.2.03.0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluaran :	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	368	256.941.510	368	219.417.450	(37.524.060)
1.06.02.2.03.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluaran :	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	29	228.943.400	29	222.424.400	(6.519.000)

Kode Rekening	Uraian	Indikator		Satuan	SEBELUM		SESUDAH		BERTAMBAH/ BERKURANG
					TARGET	PAGU ANGGARAN	TARGET	PAGU ANGGARAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	8 = (9-7)
1.06.02.2.03.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluaran :	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluarga	500	2.600.000.000	700	3.511.003.000	911.003.000
1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluaran :	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga	60	388.598.940	60	379.491.700	(9.107.240)
1.06.02.2.03.0005	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Keluaran :	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	Sertifikat	3	44.999.000	3	38.068.380	(6.930.620)
1.06.03	**PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN**	**Capaian Program :**	**Prosentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan**	**Persen**	**33,33%**	**14.319.400**	**33,33%**	**14.319.400**	**-**
1.06.03.2.01	**Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal**	**Keluaran :**	**Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Orang**	**10**	**14.319.400**	**10**	**14.319.400**	**-**
		Hasil :	**Prosentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan**	**Persen**	**33,33%**		**33,33%**		**-**
1.06.03.2.01.0001	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Keluaran :	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	10	14.319.400	10	14.319.400	-
1.06.04	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**Capaian Program :**	**Persentase PPKS yang mendapatkan rehabilitasi sosial**	**Persen**	**32,70%**	**2.214.165.145**	**36,11%**	**2.549.237.784**	**335.072.639**
1.06.04.2.01	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**	**Keluaran :**	**Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis di Luar Panti Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya**	**Orang**	**1636**	**2.043.191.470**	**1836**	**2.388.456.109**	**345.264.639**
		Hasil :	**Peresentase Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar dan gelandangan pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial**	**Persen**	**27,85%**		**31,26%**		**-**
1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan	Keluaran :	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan	Orang	350	379.770.500	350	340.058.500	(39.712.000)

Kode Rekening	Uraian	Indikator		Satuan	SEBELUM		SESUDAH		BERTAMBAH/ BERKURANG
					TARGET	PAGU ANGGARAN	TARGET	PAGU ANGGARAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	8 = (9-7)
			Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota						
1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang	Keluaran :	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	350	188.053.000	350	177.349.000	(10.704.000)
1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu	Keluaran :	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	150	310.606.800	350	750.008.000	439.401.200
1.06.04.2.01.0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Keluaran :	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	93	201.378.800	93	201.279.400	(99.400)
1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Keluaran :	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	160	567.505.770	160	549.759.209	(17.746.561)
1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Keluaran :	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	100	150.482.200	100	146.215.200	(4.267.000)
1.06.04.2.01.0007	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Keluaran :	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	70	12.468.800	70	9.518.800	(2.950.000)
1.06.04.2.01.0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Keluaran :	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	30	25.162.800	30	22.163.400	(2.999.400)
1.06.04.2.01.0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Keluaran :	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	35	12.468.800	35	10.328.800	(2.140.000)
1.06.04.2.01.0010	Pemberian Layanan Kedaruratan	Keluaran :	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	185	145.186.400	185	134.937.000	(10.249.400)
1.06.04.2.01.0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Keluaran :	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	72	39.098.800	72	38.400.000	(698.800)
1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan	Keluaran :	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayaanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	41	11.008.800	41	8.438.800	(2.570.000)
1.06.04.2.02	**Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial**	**Keluaran :**	**Jumlah PPKS Lainnya yang bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar**	**Orang**	**285**	**170.973.675**	**285**	**160.781.675**	**(10.192.000)**

Kode Rekening	Uraian	Indikator		Satuan	SEBELUM		SESUDAH		BERTAMBAH/ BERKURANG
					TARGET	PAGU ANGGARAN	TARGET	PAGU ANGGARAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	8 = (9-7)
	(PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial		**Panti Sosial yang mendapatkan rehabilitasi sosial**						
		Hasil :	**Peresentase PPKS Lainnya yang bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yangmendapatkan rehabilitasi sosial**	**Persen**	**4,85%**		**4,85%**		**-**
1.06.04.2.02.0006	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Keluaran :	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	55	59.978.875	55	58.733.875	(1.245.000)
1.06.04.2.02.0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Keluaran :	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	128	46.492.000	128	41.650.000	(4.842.000)
1.06.04.2.02.0012	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Keluaran :	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	72	39.098.800	72	39.098.800	-
1.06.04.2.02.0014	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Keluaran :	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Dokumen	30	25.404.000	30	21.299.000	(4.105.000)
1.06.05	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**Capaian Program :**	**Persentase masyarakat miskin yg mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial**	**Persen**	**100**	**47.040.658.360**	**100**	**52.947.463.920**	**5.906.805.560**
1.06.05.2.02	**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Keluaran :**	**Jumlah Masyarakat Miskin yang mendapatkan perlindungan jaminan sosial**	**Persen**	**368.650**	**47.040.658.360**	**628.850**	**52.947.463.920**	**5.906.805.560**
		Hasil :	**Persentase Pemenuhan Perlindungan Jaminan Sosial**	**Persen**	**100**		**100**		**-**
1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Keluaran :	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Orang	123.300	1.602.093.760	123.300	1.455.323.800	(146.769.960)
1.06.05.2.02.0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Keluaran :	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Keluarga	240.000	39.493.835.000	500.000	45.217.404.120	5.723.569.120
1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Keluaran :	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluarga	5.150	5.463.545.200	5.150	5.408.334.000	(55.211.200)
1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Keluaran :	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	200	481.184.400	400	866.402.000	385.217.600
1.06.06	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**Capaian Program :**	**Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap**	**Persen**	**100**	**897.557.400**	**100**	**1.278.314.000**	**380.756.600**

Kode Rekening	Uraian	Indikator		Satuan	SEBELUM		SESUDAH		BERTAMBAH/ BERKURANG
					TARGET	PAGU ANGGARAN	TARGET	PAGU ANGGARAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	8 = (9-7)
			darurat bencana daerah Kabupaten/Kota						
1.06.06.2.01	**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**	**Keluaran :**	**Jumlah Orang/Kelompok yang mendapatkan perlindungan sosial**	**Orang**	**1300**	**579.019.400**	**3300**	**987.281.000**	**408.261.600**
		Hasil :	**Persentase Cakupan Penanganan Perlindungan Sosial bagi Korban Bencana Alam dan Sosial**	**Persen**	**100**		**100**		**-**
1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan	Keluaran :	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	1300	279.283.000	3300	701.983.000	422.700.000
1.06.06.2.01.0002	Penyediaan Sandang	Keluaran :	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	650	249.800.000	650	249.800.000	-
1.06.06.2.01.0003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Keluaran :	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	Unit	6	19.698.400	6	6.260.000	(13.438.400)
1.06.06.2.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Keluaran :	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	65	18.946.000	65	18.446.000	(500.000)
1.06.06.2.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	Keluaran :	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	65	11.292.000	65	10.792.000	(500.000)
1.06.06.2.02	**Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota**	**Keluaran :**	**Jumlah Item Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota**	**Item**	**7**	**318.538.000**	**7**	**291.033.000**	**(27.505.000)**
		Hasil :	**Prosentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana**	**Persen**	**100**		**100**		**-**
1.06.06.2.02.0001	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Keluaran :	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Kampung	6	185.528.000	6	171.228.000	(14.300.000)
1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Keluaran :	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	150	133.010.000	150	119.805.000	(13.205.000)
1.06.07	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	**Capaian Program :**	**Persentase pemenuhan pemeliharaan TMP**	**Persen**	**85**	**287.766.500**	**85**	**234.367.400**	**(53.399.100)**

Kode Rekening	Uraian	Indikator		Satuan	SEBELUM		SESUDAH		BERTAMBAH/ BERKURANG
					TARGET	PAGU ANGGARAN	TARGET	PAGU ANGGARAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	8 = (9-7)
1.06.07.2.01	**Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota**	**Keluaran :**	**Jumlah Dokumen dan Laporan Hasil Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan**	**Dokumen**	**14**	**287.766.500**	**14**	**234.367.400**	**(53.399.100)**
		Hasil :	**Persentase pemenuhan pemeliharaan TMP**	**Persen**					**-**
1.06.07.2.01.0001	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Keluaran :	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Dokumen	1	45.130.100	1	43.530.100	(1.600.000)
1.06.07.2.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Keluaran :	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	Makam	1	206.312.400	1	154.513.300	(51.799.100)
1.06.07.2.01.0003	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Keluaran :	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Laporan	12	36.324.000	12	36.324.000	-
Jumlah alokasi belanja						**69.268.354.563**		**76.166.823.382**	**6.898.468.819**

Berdasarkan table diatas, hasil efisiensi / refocusing Tahun Anggaran 2025 Dinas Sosial total Anggaran Belanja Dinas Sosial telah melakukan efisiensi / refocusing sesuai dengan kriteria yang tertera pada Intruksi Presiden. Disamping itu Dinas Sosial Kabupaten Tangerang mendapatkan alokasi penambahan anggaran sebesar Rp. 6.898.468.819 yang di fokuskan untuk penanganan Kemiskinan Ekstrim yang terbagi dalam beberapa kegiatan diantaranya :

1. Sebanyak Rp. 402.000.000 dipergunakan untuk Penambahan Sasaran Bantuan Sosial dalam bentuk pemberian bantuan permodalan kepada Usaha Ekonomi Produktif (UEP);
2. Sebanyak Rp. 985.700.000 dipergunakan untuk Penambahan Sasaran Bantuan Sosial dalam bentuk pemberian bantuan permodalan kepada Kelompok Usaha Bersama (KUBE);
3. Sebanyak Rp. 439.600.000 dipergunakan untuk Penambahan Sasaran Bantuan Sosial dalam bentuk Alat Bantu Kesehatan (Kursi Roda) bagi Penyandang Disabilitas;
4. Sebanyak Rp. 422.700.000 dipergunakan untuk Penyediaan Makanan dalam bentuk Buffer Stock dalam Penanganan Bencana Alam / Sosial;
5. Sebanyak Rp. 4.648.468.819 dipergunakan untuk Penambahan Sasaran Bantuan Iuran Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan serta verifikasi dan validasi data penerimanya.

Pada perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2025 Dinas Sosial mendapatkan pengurangan alokasi anggaran sebesar Rp. 223.795.014 *(Dua Ratus Dua Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Empat Belas Rupiah)* yang dipergunakan untuk penyesuaian belanja pegawai (-Rp. 290.995.014,-) Rp. dan penambahan belanja gaji 13 dan 14 non ASN (Rp. 67.200.000,-) atau sekitar 0,29% dari Rp. 76.166.823.382 *(Tujuh Puluh Enam Miliyar Seratus Enam Puluh Enam Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah*) ***Pagu hasil refocusing,** Sehingga alokasi anggaran perubahan Dinas Sosial menjadi sebesar Rp. 75.943.028.368 *(Tujuh Puluh Lima Miliyar Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Juta Dua Puluh*

Delapan Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah) Adapun Perubahan Rumusan rencana program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel. 3.2
Perubahan Rumusan rencana program, kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Sosial Kab. Tangerang Tahun 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		DINAS SOSIAL				**52.810.726.996**	**69.268.354.563**	**75.943.028.368**	**23.132.301.372**							**32.840.323.914,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**52.810.726.996**	**69.268.354.563**	**75.943.028.368**	**23.132.301.372**							**32.840.323.914,00**	
	1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**				**52.810.726.996**	**69.268.354.563**	**75.943.028.368**	**23.132.301.372**							**32.840.323.914,00**	
1,	**1.06.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan**	**100 Persen**	**100 Persen**	**13.986.653.153**	**15.249.164.408**	**14.506.840.534**	**894.604.847**						**100 Persen**	**14.881.258.000,00**	
	1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	11 Dokumen	11 Dokumen	179.970.700	251.906.000	204.764.000	24.793.300			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Dinas Sosial	10 Dokumen	235.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	7 Dokumen	107.586.700	152.871.000	124.767.000	17.180.300	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Dinas Sosial	6 Dokumen	135.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD															
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	17.547.600	34.341.000	27.479.000	9.931.400	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Dinas Sosial	1 Laporan	45.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan	54.836.400	64.694.000	52.518.000	-2.318.400	Kab. Tangerang, Semua Kecam	PENDAPATAN ASLI DAERA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi,	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola	Dinas Sosial	3 Laporan	55.000.000,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
										atan, Semua Kel/Desa	H (PAD)	serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik				
	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen dokumen adminstrasi keuangan*	15 Dokumen	23 Dokumen	10.712.254.796	11.390.923.695	11.071.181.681	358.926.885			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Dinas Sosial	15 Dokumen	10.715.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN															
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45/12 Orang/bulan	45/12 Orang/bulan	10.606.526.996	11.275.060.995	10.984.065.981	377.538.985	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola	Dinas Sosial	45/12 Orang/bulan	10.500.000.000,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
												penyeludupan.	Pemerintahan yang Baik				
	1.06.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD															
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	6 Laporan	77.845.200	51.476.700	39.892.700	-37.952.500	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Dinas Sosial	1 Laporan	95.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD															
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan a n/Semesteran SKPD	1 Laporan	4 Laporan	13.019.600	51.316.000	37.840.000	24.820.400	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Dinas Sosial	1 Laporan	70.000.000,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	1.06.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran															
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	14.863.000	13.070.000	9.383.000	-5.480.000	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Dinas Sosial	1 Dokumen	50.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen dokumen Barang Milik Daerah*	4 Dokumen	4 Dokumen	14.674.400	12.895.104	9.796.328	-4.878.072			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Dinas Sosial	4 Dokumen	25.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD															
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	14.674.400	12.895.104	9.796.328	-4.878.072	Kab. Tangerang, Semua Kecam	PENDAPATAN ASLI DAERA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi,	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola	Dinas Sosial	4 Dokumen	25.000.000,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
										atan, Semua Kel/Desa	H (PAD)	serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik				
	1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen Pembinaan Pegawai*	2 Dokumen	2 Dokumen	214.163.000	287.353.600	266.921.350	52.758.350			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Dinas Sosial	2 Dokumen	550.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya															
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	60 Paket	60 Paket	88.464.000	136.898.400	136.898.400	48.434.400	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola	Dinas Sosial	60 Paket	270.000.000,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
												penyeludupan.	Pemerintahan yang Baik				
	1.06.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi															
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	60 Orang	60 Orang	125.699.000	150.455.200	130.022.950	4.323.950	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Dinas Sosial	60 Orang	280.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah*	7 Dokumen	7 Dokumen	1.198.054.664	1.614.239.216	1.206.870.836	8.816.172			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Dinas Sosial	7 Dokumen	1.455.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	5 Paket	14.964.500	22.585.059	22.585.059	7.620.559	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Dinas Sosial	15 Paket	40.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.00 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor															
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	29 Paket	393.373.864	526.436.535	522.989.985	129.616.121	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Dinas Sosial	20 Paket	550.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.00 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga															
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	26 Paket	28 Paket	49.978.200	42.446.957	42.446.957	-7.531.243	Kab. Tangerang, Semua Kecam	PENDAPATAN ASLI DAERA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi,	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola	Dinas Sosial	25 Paket	45.000.000,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
										atan, Semua Kel/Desa	H (PAD)	serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik				
	1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor															
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	36 Paket	32 Paket	99.760.100	103.517.105	103.517.105	3.757.005	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Dinas Sosial	50 Paket	120.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan															
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	8 Paket	40.000.000	55.193.560	41.370.730	1.370.730	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberanta	Meningkatkan	Dinas Sosial	15 Paket	50.000.000,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
												san korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik				
	1.06.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu															
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	99.978.000	98.570.000	77.035.000	-22.943.000	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Dinas Sosial	12 Laporan	150.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD															
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	500.000.000	765.490.000	396.926.000	-103.074.000	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerinta	Dinas Sosial	12 Laporan	500.000.000,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
													han yang Baik				
	1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah dokumen Jasa Penunjang*	12 Dokumen	12 Dokumen	933.280.292	1.055.539.676	1.110.999.222	177.718.930			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Dinas Sosial	12 Dokumen	1.011.258.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat															
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	5.148.000	132.495.816	132.433.862	127.285.862	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Dinas Sosial	12 Laporan	15.300.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik															
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,	12 Laporan	12 Laporan	42.998.292	42.998.292	42.998.292	-	Kab. Tangerang,	PENDAPATAN ASLI	Memperkuat reformasi politik,	Meningkatkan Penyelengg	Dinas Sosial	12 Laporan	65.000.000,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan							Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAERAH (PAD)	hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	araan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik				
	1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor															
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	885.134.000	880.045.568	935.567.068	50.433.068	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Dinas Sosial	12 Laporan	930.958.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan*	12 Dokumen	12 Dokumen	734.255.301	636.307.117	636.307.117	-97.948.184			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi,	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelengg	Dinas Sosial	12 Dokumen	890.000.000,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
												narkoba, judi, dan penyeludupan.	araan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik				
	1.06.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan															
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	46 Unit	46 Unit	494.505.301	433.462.117	433.462.117	-61.043.184	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Dinas Sosial	25 Unit	600.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	32 Unit	32 Unit	39.750.000	39.750.000	39.750.000	-	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Dinas Sosial	45 Unit	90.000.000,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	1.06.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya															
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	200.000.000	163.095.000	163.095.000	-36.905.000	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Dinas Sosial	1 Unit	200.000.000,00	DINAS SOSIAL
2,	**1.06.02**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**Persentase PSKS yang meningkat perannya dalam usaha kesejahteraan sosial**	**100 persen**	**100 persen**	**3.482.266.050**	**3.564.723.350**	**4.407.685.330**	**-1.232.266.050**						**100 persen**	**2.250.000.000,00**	
	1.06.02.2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang*	20 Dokumen	20 Dokumen	54.999.700	45.240.500	37.280.400	-17.719.300			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan,	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia	PSKS	25 Dokumen	350.000.000,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
												pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	1.06.02.2.02.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang															
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	20 Dokumen	20 Dokumen	54.999.700	45.240.500	37.280.400	-17.719.300	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia	PSKS	25 Dokumen	350.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang meningkat kapasitasnya*	1399 PSKS	1157 PSKS	3.427.266.350	3.519.482.850	4.370.404.930	943.138.580			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi,	Meningkat	PSKS	882 PSKS	1.900.000.000,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
												pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	kan Pembangunan Sumber Daya Manusia				
	1.06.02.2.03.0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota															
			Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	310 Orang	368 Orang	136.247.700	256.941.510	219.417.450	83.169.750	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia		349 Orang	300.000.000,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
												penyandang disabilitas.					
	1.06.02.2.03.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota															
			Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	29 Orang	29 Orang	237.340.700	228.943.400	222.424.400	-14.916.300	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia	PSKS	29 Orang	500.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota															
			Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	1000 Keluarga	700 Keluarga	2.599.876.000	2.600.000.000	3.511.003.000	911.127.000	Kab. Tangerang, Rajeg, Sukamanah Kab. Tangerang, Rajeg,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan,	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Meningkatkan Pembangu	PSKS	500 Keluarga	700.000.000,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
										Pangarengan Kab. Tangerang, Teluknaga, Kampung Besar Kab. Tangerang, Pakuhaji, Kiara Payung Kab. Tangerang, Sindang Jaya, Sindangsono Kab. Tangerang, Sindang Jaya, Sindangasih Kab. Tangerang, Sepatan Timur, Lebak Wangi Kab.		prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	nan Sumber Daya Manusia				

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
										Tangerang, Solear, Cikuya Kab. Tangerang, Gunung Kaler, Rancagede							
	1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota															
			Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	60 Lembaga	60 Lembaga	408.829.650	388.598.940	379.491.700	-29.337.950	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia		30 Lembaga	350.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0005	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Sertifikat	3 Sertifikat	44.972.300	44.999.000	38.068.380	-6.903.920	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia	PSKS	3 Sertifikat	50.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.03	**PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN**	**Prosentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan**	**33,33 persen**	**33,33 persen**	**15.824.300**	**14.319.400**	**14.319.400**	**-15.824.300**					**PPKS**	**33,33 persen**	**20.000.000**	
	1.06.03.2.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke	*Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota*	33,33 Persen	10 Orang	15.824.300	14.319.400	14.319.400	-1.504.900			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Meningkatkan Pembangunan	PPKS	10 Orang	20.000.000	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Desa/Kelurahan Asal										olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Sumber Daya Manusia				
	1.06.03.2.01.0001	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal															
			Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	10 Orang	15.824.300	14.319.400	14.319.400	-1.504.900	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia	PSKS	10 Orang	20.000.000	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4,	**1.06.04**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**Persentase PPKS yang mendapatkan rehabilitasi sosial**	**32,70 persen**	**36.11 persen**	**2.090.994.950**	**2.214.165.145**	**2.549.237.784**	**796.005.050**					**PPKS**	**33,67 Persen**	**2.887.000.000,00**	
	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	*Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis di Luar Panti Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya*	1636 Orang	1836 Orang	1.715.477.150	2.043.191.470	2.388.456.109	672.978.959			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia	PPKS	1764 Orang	2.250.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan															
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	350 Orang	350 Orang	296.531.800	379.770.500	340.058.500	43.526.700	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Meningkatkan Pembangunan	PPKS	350 Orang	350.000.000,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
												olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Sumber Daya Manusia				
	1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang															
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	300 Orang	350 Orang	221.315.000	188.053.000	177.349.000	-43.966.000	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia	PPKS	350 Orang	350.000.000,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu															
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	150 Orang	350 Orang	332.384.550	310.606.800	750.008.000	417.623.450	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia	PPKS	175 Orang	375.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga															
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	35 Orang	93 Orang	81.317.000	201.378.800	201.279.400	119.962.400	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga,	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Meningkatkan Pembangunan Sumber	PPKS	105 Orang	100.000.000,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
												kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Daya Manusia				
	1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat															
			Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	100 Orang	141.895.000	150.482.200	146.215.200	4.320.200	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia	PPKS	120 Orang	250.000.000,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	1.06.04.2.01.0007	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak															
			Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	70 Orang	70 Orang	21.257.000	12.468.800	9.518.800	-11.738.200	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia	PPKS	70 Orang	50.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar															
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	145 Orang	30 Orang	32.717.000	25.162.800	22.163.400	-10.553.600	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga,	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Meningkatkan Pembangunan Sumber	PPKS	30 Orang	75.000.000,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
												kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Daya Manusia				
	1.06.04.2.01.0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan															
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	35 Orang	35 Orang	11.417.000	12.468.800	10.328.800	-1.088.200	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia	PPKS	35 Orang	50.000.000,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	1.06.04.2.01.0010	Pemberian Layanan Kedaruratan															
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	120 Orang	185 Orang	111.013.700	145.186.400	134.937.000	23.923.300	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia	PPKS	120 Orang	130.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga															
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	130 Orang	72 Orang	31.217.000	39.098.800	38.400.000	7.183.000	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga,	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Meningkatkan Pembangunan Sumber	PPKS	84 Orang	70.000.000,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
												kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Daya Manusia				
	1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan															
			Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	41 Orang	41 Orang	14.417.000	11.008.800	8.438.800	-5.978.200	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia	PPKS	35 Orang	50.000.000,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	*Jumlah PPKS Lainnya yang bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang mendapatkan rehabilitasi sosial*	285 Orang	285 Orang	375.517.800	170.973.675	160.781.675	-214.736.125			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia	PPKS	214 Orang	637.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0006	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti															
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	55 Orang	55 Orang	70.365.800	59.978.875	58.733.875	-11.631.925	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia	PPKS	70 Orang	150.000.000,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
												penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	1.06.04.2.02.0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial															
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	128 Orang	42.712.000	46.492.000	41.650.000	-1.062.000	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia	PPKS	120 Orang	220.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0012	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	120 Orang	72 Orang	248.417.000	39.098.800	39.098.800	-209.318.200	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia	PPKS	84 Orang	250.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0014	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota															
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	10 Dokumen	10 Dokumen	14.023.000	25.404.000	21.299.000	7.276.000	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia	PPKS	10 Dokumen	17.000.000,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
												penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
5,	**1.06.05**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**Persentase masyarakat miskin yg mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial**	**100 persen**	**100 persen**	**32.081.077.143**	**47.040.658.360**	**52.947.463.920**	**-21.651.511.229**					**PPKS**	**100 persen**	**10.429.565.914,00**	
	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Masyarakat Miskin yang mendapatkan perlindungan jaminan sosial*	325750 Orang	628850 Orang	32.081.077.143	47.040.658.360	52.947.463.920	20.866.386.777			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia	PPKS	123300 Orang	10.429.565.914,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota															
			Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	123300 Orang	123300 Orang	1.298.060.760	1.602.093.760	1.455.323.800	157.263.040	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia	PPKS	123300 Orang	1.209.565.914,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02.0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota															
			Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	200000 Keluarga	500000 Keluarga	27.931.999.880	39.493.835.000	45.217.404.120	17.285.404.240	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga,	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Meningkatkan Pembangunan Sumber	PPKS	500000 Keluarga	0,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
												kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Daya Manusia				
	1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga															
			Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	2250 Keluarga	5150 Keluarga	2.401.286.503	5.463.545.200	5.408.334.000	3.007.047.497	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia	PPKS	5500 Keluarga	8.500.000.000,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat															
			Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Orang	400 Orang	449.730.000	481.184.400	866.402.000	416.672.000	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia	PPKS	250 Orang	720.000.000,00	DINAS SOSIAL
6,	**1.06.06**	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah**	**100 Persen**	**100 Persen**	**898.664.100**	**897.557.400**	**1.278.314.000**	**767.335.900**					**Korban Bencana**	**100 persen**	**1.666.000.000,00**	
	1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	*Jumlah Orang/Kelompok yang mendapatkan perlindungan sosial*	2086 Orang	3300 Orang	625.054.700	579.019.400	987.281.000	362.226.300			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM),	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya	Korban Bencana	1400 Orang	1.168.000.000,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
												sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Manusia Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia				
	1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan															
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	1300 Orang	3300 Orang	288.178.100	279.283.000	701.983.000	413.804.900	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia	Korban Bencana	1400 Orang	410.000.000,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
												generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	1.06.06.2.01.0002	Penyediaan Sandang															
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	650 Orang	650 Orang	245.230.000	249.800.000	249.800.000	4.570.000	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia	Korban Bencana	750 Orang	410.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.01.0003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi															
			Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Unit	6 Unit	43.538.400	19.698.400	6.260.000	-37.278.400	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi,	Meningkat	Korban Bencana	6 Unit	78.000.000,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
										Kel/Desa		pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	kan Pembangunan Sumber Daya Manusia				
	1.06.06.2.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan															
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	65 Orang	65 Orang	23.607.200	-	-	-23.607.200	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia	Korban Bencana	70 Orang	0,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
												penyandang disabilitas.					
	1.06.06.2.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan															
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	65 Orang	-	18.946.000	18.446.000	18.446.000	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia	Korban Bencana	70 Orang	220.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial															
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	65 Orang	65 Orang	24.501.000	11.292.000	10.792.000	-13.709.000	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan,	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Meningkatkan Pembangu	Korban Bencana	70 Orang	50.000.000,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
												prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	nan Sumber Daya Manusia				
	1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	*Jumlah Item Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota*	7 Item	7 Item	273.609.400	318.538.000	291.033.000	17.423.600			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia	TAGANA	2 Item	498.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.02.0001	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Kampung	6 Kampung	198.609.400	185.528.000	171.228.000	-27.381.400	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia	TAGANA	6 Kampung	348.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana															
			Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	150 Orang	150 Orang	75.000.000	133.010.000	119.805.000	44.805.000	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia	TAGANA	160 Orang	150.000.000,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
												penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
7,	**1.06.07**	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	**Persentase pemenuhan pemeliharaan TMP**	**85 persen**	**85 persen**	**255.247.300**	**287.766.500**	**239.167.400**	**471.252.700**						**90 Persen**	**726.500.000,00**	
	1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen dan Laporan Hasil Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan*	14 Dokumen	14 Dokumen	255.247.300	287.766.500	239.167.400	-16.079.900			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia	Taman Makam Pahlawan	14 Dokumen	726.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.07.2.01.0001	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	88.461.400	45.130.100	43.530.100	-44.931.300	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia	Taman Makam Pahlawan	1 Dokumen	470.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.07.2.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota															
			Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	1 Makam	1 Makam	130.461.900	206.312.400	154.513.300	24.051.400	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia	Taman Makam Pahlawan	1 Makam	216.500.000,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
												penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	1.06.07.2.01.0003	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota															
			Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	12 Laporan	12 Laporan	36.324.000	36.324.000	41.124.000	4.800.000	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia	Taman Makam Pahlawan	12 Laporan	40.000.000,00	DINAS SOSIAL
		UPTD REHABILITASI PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL				**52.810.726.996**	**69.268.354.563**	**75.943.028.368**	**23.132.301.372**							**32.840.323.914,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**52.810.726.996**	**69.268.354.563**	**75.943.028.368**	**23.132.301.372**							**32.840.323.914,00**	
	1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**				**52.810.726.996**	**69.268.354.563**	**75.943.028.368**	**23.132.301.372**							**32.840.323.914,00**	
1,	**1.06.04**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**Persentase PPKS yang mendapatkan rehabilitasi sosial**	**32,70 persen**	**36.11 persen**	**2.090.994.950**	**2.214.165.145**	**2.549.237.784**	**796.005.050**							**2.887.000.000,00**	
	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	*Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis di Luar Panti Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya*	1636 Orang	1636 Orang	1.715.477.150	2.043.191.470	2.388.456.109	672.978.959			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia	PPKS		2.250.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	160 Orang	160 Orang	419.995.100	567.505.770	549.759.209	129.764.109	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia	PPKS		400.000.000,00	DINAS SOSIAL
	JUMLAH					**52.810.726.996**	**69.268.354.563**	**75.943.028.368**	**1.284.717.462.164**							**32.840.323.914,00**	

3.2. RENCANA KERJA STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) TAHUN 2025

Pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana disajikan pada bagian terdahulu, diprioriaskan pula untuk mendanai urusan pemerintah wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaiman amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, bahwa terdapat 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang terdiri dari Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Ketentraman, ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat dan Sosial.

Dinas Sosial mengampu urusan sosial yang capaian dan targetnya disajikan tabel berikut ini :

Tabel 3.3
Capaian dan Target Pencapaian SPM Tahun 2022-2025

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Satuan	Capaian			Target 2025		Target Nasional
				2022	2023	2024	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1	Rehabilitasi sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	%	97,33	100	100	100	100	100
2	Rehabilitasi sosial dasar Anak Telantar di luar panti	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	%	97,33	100	100	100	100	100
3	Rehabilitasi sosial dasar Lanjut Usia Telantar di luar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	%	97,34	100	100	100	100	100
4	Rehabilitasi sosial dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara khususnya gelandangan dan Pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	%	93,33	100	100	100	100	100
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska	Jumlah Warga Negara korban bencana Kabupaten	%	88,37	100	100	100	100	100

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Satuan	Capaian			Target 2025		Target Nasional
				2022	2023	2024	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
	bencana bagi korban bencana Kabupaten	yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial							

Dalam rangka pemenuhan SPM, rencana sub kegiatan yang digunakan pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pemenuhan SPM Sosial

NO	KODE REKENING	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
I	1.06.04	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**		
A	1.06.04.2.01		**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**	
1	1.06.04.2.01.01			Penyediaan Permakanan
2	1.06.04.2.01.02			Penyediaan Sandang
3	1.06.04.2.01.03			Penyediaan Alat Bantu
4	1.06.04.2.01.04			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
5	1.06.04.2.01.05			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
6	1.06.04.2.01.06			Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat
7	1.06.04.2.01.07			Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak
8	1.06.04.2.01.08			Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
9	1.06.04.2.01.09			Pemberian Layanan Data dan Pengaduan
10	1.06.04.2.01.10			Pemberian Layanan Kedaruratan
11	1.06.04.2.01.11			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
12	1.06.04.2.01.12			Pemberian Layanan Rujukan
13	1.06.04.2.02.06			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti
II	1.06.06	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**		
B	1.06.06.2.01		**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**	
14	1.06.06.2.01.01			Penyediaan Makanan
15	1.06.06.2.01.02			Penyediaan Sandang
16	1.06.06.2.01.03			Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi
17	1.06.06.2.01.04			Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan
18	1.06.06.2.01.05			Pelayanan Dukungan Psikososial

3.3. TARGET INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) TAHUN 2025

Tabel 3.5
Target Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tahun 2025
Dinas Sosial

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	DEFINISI OPERASIONAL	CAPAIAN		TARGET TAHUN 2025	
					2023	2024*	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
1.1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemisyang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti dibagi Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis dikali 100%	100%	100%	100%	100%
1.2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran dibagi Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota dikali 100%	85%	100%	100%	100%

3.4. TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2025

Tabel 3.6
Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025
Dinas Sosial

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Satuan	Target 2025	
					Sebelum Perubahan	Sebelum Perubahan
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya cakupan penanganan PPKS yang terlayani	Persentase PPKS yang Berdaya	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar. PPKS Berdaya adalah PPKS yang sudah memiliki kemampuan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasarnya. PPKS yang ditargetkan akan berdaya adalah PPKS dengan beberapa ketentuan, mulai Anak terlantar, Lansia Terlantar, Penyandang Disabilitas Terlantar, WRSE, Eks Napi dan Fakir Miskin Desil 1.	Persen	1,69%	1,69%

BAB IV
PENUTUP

Dokumen Perubahan Renja Dinas Sosial Kabupaten Tangerang Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan yang harus dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program kegiatan dan Sub Kegiatan selama tahun 2025 di lingkup Dinas Sosial Kabupaten Tangerang. Perubahan Renja Dinas Sosial Kabupaten Tangerang tahun 2025 berpedoman kepada Perubahan RKPD Tahun 2025 dan telah memuat hasil evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan Sub Kegiatan hingga triwulan I tahun anggaran 2025, serta memuat permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Sosial Kabupaten Tangerang dalam pelaksanaan program kegiatan dan Sub Kegiatan.

Dalam hal adanya kebijakan terkait kondisi keuangan daerah yang akan mempengaruhi pelaksanaan Perubahan Renja ini maka optimalisasi dalam pelaksanaan isi Perubahan Renja ini melalui perubahan strategi pelaksanaan merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan, sesuai dengan kewenangan urusan penunjang yang diemban oleh Dinas Sosial Kabupaten Tangerang sebagai salah satu perangkat daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Tangerang. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan isi Perubahan Renja Dinas Sosial Kabupaten Tangerang Tahun 2025 ini.

Terdapat beberapa hal yang perlu di perhatikan dalam perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 adalah :

1. Catatan Penting Renja Perubahan Dinas Sosial Kabupaten Tangerang disusun sejalan dengan penjabaran dari tujuan Dinas Sosial Kabupaten Tangerang yang tertuang dalam Renstra yaitu :
   a. Meningkatkan PPKS yang berdaya
   b. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
   c. Meningkatkan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan

   Diharapkan melalui Renja yang disusun dengan mekanisme perencanaan yang komprehensif dan terpadu ini, kinerja pembangunan Dinas Sosial Kabupaten Tangerang dapat semakin fokus untuk menyelesaikan berbagai permasalahan aktual yang masih dihadapi saat ini.
2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan Dalam rangka pelaksanaan renja tahun 2025, maka diperlukan kaidah-kaidah pelaksanaan supaya program kegiatan dan Sub Kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan harapan pembangunan. Adapun beberapa kaidah-kaidah pelaksanaan adalah sebagai berikut:
   a. Dalam melaksanakan Renja Perubahan Dinas Sosial ini seluruh aparatur di lingkungan Dinas Sosial mempunyai tanggungjawab untuk melaksanakan Renja tersebut dengan sebaikbaiknya;
   b. Renja Perubahan Dinas Sosial Kabupaten Tangerang haruslah berpedoman kepada Perubahan RKPD dan disinkronkan dengan prioritas pembangunan nasional dan propinsi supaya perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan selaras dan bersinergi;

c. Dokumen Renja Perubahan ini kemudian menjadi acuan dalam menyusun Rencana Perubahan Kerja dan Anggaran (RKPA) program kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025;
d. Dokumen Renja Perubahan ini digunakan sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat tahunan.

3. Rencana Tindak Lanjut Untuk mencapai target sasaran Dinas Sosial Kabupaten Tangerang yang telah ditetapkan pada tahun 2025 maka perlu didukung dengan program, kegiatan dan sub kegiatan. Agar program dan kegiatan tersebut dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan maka perlu dilakukan koordinasi lintas Unit Kerja/Perangkat Daerah dalam rangka sinergitas.

   Demikian kiranya Rencana Kerja Perubahan Dinas Sosial Kabupaten Tangerang Tahun 2025 ini disusun. Semoga dokumen ini dapat bermanfaat sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas secara berkesinambungan.

17. Dinas Tenaga Kerja

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah merupakan bentuk pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Undang-undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja OPD untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah di tetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Rencana Kerja OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah yang di tempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat

Rencana Kerja Dinas Kerja Kerja Kabupaten Tangerang adalah dokumen perencanan program dan kegiatan jangka 1 (satu) tahun yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan rancangan awal RKPD dan dan Renstra Dinas Tenaga Kerja.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2019 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pasal 343 (ayat 1) Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuai dengan perkembangan keaadaan meliputi :

a) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pebangunan daerah kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenan dan/ atau
b) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan pada tahun berjalan.

Berdasarkan evaluasi dalam pelaksanaan APBD tahun berjalan 2025, dengan memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan program kegiatan Disnaker Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2025 sampai dengan Triwulan II dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi yang meliputi : perubahan asumsi makro ekonomi terhadap kemampuan fiskal daerah, penyesuaian sasaran dan hasil yang harus dicapai, perubahan kebijakan pusat, proyeksi prioritas belanja, serta aspirasi masyarakat dan permasalahan aktual yang berkembang, maka harus dilakukan perubahan sesuai dengan peraturan perundangan. Serta

adanya Instruksi Presiden nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan kondisi tersebut, Dinas tenaga Kerja Kabupaten Tangerang dapat melakukan pergeseran pagu antar kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/ kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan dalam Perubahan RKPD tahun 2025.

Sebagaimana diamanatkan didalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tangerang bahwa tema pembangunan tahun 2025 Kabupaten Tangerang yaitu; *"Pemerataan Pembangunan Berwawasn Lingkungan Dalam Upaya Peningkatan Daya Saing Daerah Melalui Kolaborasi Antar Sektor"* dengan prioritas pembangunan yaitu :

1. Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing
2. Perekonomian masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing
3. Pemenuhan pemerataan pembangunan Infrastruktur yang berkualitas
4. Tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel

Sedangkan prioritas pembangunan ketenagakerjaan sesuai dengan arah dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Tangerang tahun 2025 yaitu meningkatkan perekonomi masayarakat yaitu penanganan kemiskinan ekstrem dan pengangggguran dengan meningkatkan daya saing tenaga kerja berupa :

1. Peningkatan keterampilan tenaga kerja melalui pelatihan berbasis kompetensi, masyarakat dan pemagangan
2. Peningkatan akses dan kemudahan layanan informasi lowongan kerja bagi pencari kerja melalui sistem informasi berbasis web
3. Peningkatan perlindungan hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha

Untuk mewujudkan hal tersebut peran dinas dalam peningkatan pelayanan dimana prioritas pembangunan ketenagakerjaan yaitu penanganan masalah pengangguran melalui peningkatan kompetensi dan produktivtas tenaga kerja yang dapat memiliki daya saing, meningkatkan penyerapan tenaga kerja melalui penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja/berusaha dan peningkatan kesejahteraan dan menciptakan hubungan industrial yang harmonis. dinamis dan berkeadilan dengan tetap mengacu pada kondisi dan potensi daerah serta aspirasi yang tumbuh dan berkembang ditengah-tengah masyarakat.

1.2 Dasar Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang, adalah :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 29 tahun Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penyelenggaran Ketenagakerjaan;
13. Peraturan Bupati Tangerang Noomor 139 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Tugas Pokok dan Rincian Tugas serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang.
14. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 22 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang.
15. Peraturan Bupati Tangerang nomor 39 Tahun 2023 tentang Rencana pembangunan Daerah kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Perubahan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang Tahun 2025 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanan dan pengawasan program kegiatan dalam menjabarkan visi, misi, dan program Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang yang merupakan hasil penjabaran RENSTRA Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang2024–2026. Sebagai konsekuensinya maka program tersebut harus dirumuskan dan diimplementasikan serta ditetapkan didalam Perencanaan Pembangunan Ketenagakerjaan tahunan

yang direalisasikan dalam rencana kerja dan Anggaran (RKA),

Tujuan penyusunan Rencana Kerja perubahan Disnaker Tahun 2025 adalah untuk:

1. Memberikan arah dan kebijakan tentang pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2025.
2. Untuk menyelaraskan pencapaian Renstra Dinas Tenaga Kerja dengan tujuan perencanaan dan penganggaran program/kegiatan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang.

1.4. Sistematika Penulisan

Penyusunan Renja OPD ini didasarkan kepada sistematika dokumen sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Menjelaskan mengenai Latar Belakang Penyusunan Dokumen Renja, Dasar Hukum Penyusunan, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan Dokumen Renja Perubahan OPD.

BAB II Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II tahun 2025

Menjelaskan mengenai Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD dan Analisis Kinerja pelayanan OPD berupa capaian kinerja pelayanan OPD yang sudah di tentukan. Isu-isu pentung penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD serta Review terhadap rancangan awal perubahan Renja OPD.

BAB III Rencana Kerja dan Pendanan Perangkat Daerah

Menjelaskan mengenai Telahan terhadap Kebijakan Nasional. Propinsi dan Kabupaten, Tujuan dan sasaran Renja OPD dan Rencana Program Kegiatan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang pada Perubahan Renja tahun anggaran 2025.

BAB IV Penutup

Menjelaskan mengenai Komitmen Pelaksanaan Kegiatan yaitu dalam melaksanakan program-program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2025, kaidah kaidah pelaksanan dan rencana tindak lanjut

BAB II
EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1. Analis Capaian Kinerja sasaran Strategis

Dalam merumuskan program dan Kegiatan dalam rencana kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang telah menetapkan 2 indikator kinerja sasaran sesuai dengan Renstra yang telah di tetapkan. Pencapain kinerja Dinas Tenaga Kerja sampai dengan triwulan II tahun 2025 belum dapat menggambarkan capaian kinerja secara keseluruhan di sebabkan masih dalam proses pelaksanaan program dan kegiatan adapaun capaian kinerja sasaran strategis yaitu :

1. Meningkatnya Ketersediaan tenaga kerja yang kompeten sesuai kebutuhan pasar kerja
   Sasaran Meningkatnya Ketersediaan tenaga kerja yang kompeten sesuai kebutuhan pasar kerja dengan indicator persentase pencari kerja yang ditempatkan sampai dengan Bulan Mei telah terealisasi 19,95 % dari target 70,25% di tahun 2025 dengan capaian kinerja 28,39 %. Capaian sampai dengan triwulan II masih sangat rendah dan belum mencapai target kinerja yang diharapkan.
   Berdasarkan data Informasi Pasar Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang tahun 2025, jumlah pencari kerja yang ditempatkan yaitu dari 7.559 orang, sedangkan proyeksi pencari kerja tahun 2025 Dinas Tenaga Kerja berjumlah 37,874 orang.

Tabel II.1
Informasi Pasar Kerja s/d Bulan Mei 2025

No	Uraian	Satuan	Jumlah
1	Pencari Kerja Terdaftar	Orang	10.942
2	Lowongan Kerja	Orang	11.697
3	Penempatan Pencari Kerja	Orang	7559

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiaan di triwulan I tahun 2025 terdapat beberapa permasalahan yang harus mendapat perhatian sebagai berikut:

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiaan di triwulan II tahun 2025 terdapat beberapa permasalahan yang harus mendapat perhatian sebagai berikut:

1. Kurangnya minat pencari kerja untuk mengikuti pelatihan di beberarapa program pelatihan AC, Digital Marketing, Servis HP dan kesiapan pelaksanaan pelatihan di lokasi baik peserta maupun tempat.
2. Belum optimalnya kerja sama pelatihan dan penempatan sehingga lulusan pelatihan belum semua dapat terserap di dunia industri.
3. Masih banyak Perusahaan belum menyampaikan informasi lowongan dan penempatan tenaga kerja.
4. Masih banyaknya kasus Perselisihan Hubungan Industrial terutama kasus PHK
5. Adanya penyesuain anggaran mengakibatkan adanya perubahan jadwal kegiatan

Menindaklanjuti hal tersebut perlu upaya dalam menangani dan menyelesaikan permasalahan diatas melalui :

1. Meningkatkan dan menambah frekuensi sosialisasi berbagai program pelatihan dan dilakasanakan oleh UPT Latihan Kerja.
2. Dalam melaksanakan pelatihan perlu dilakukan analis traning kebutuhan pelatihan sehingga dalam rangka pelaksanaan pelatihan dapat di sesuaiakan dengan kebutuhan industri dengan melibatkan stekholder terkait dan mengoptimalkan kerja sama pelatihan dan penempatan melalui forum komunikasi lembaga pelatihan dan dunia industri daerah.
3. Optimalisasi sistem aplikasi D'Naker Digi kepada perusahaan melalui sosialisasi dan melakukan monitoring dan pembinaan ke perusahaan mengenai wajib lapor lowongan dan penempatan
4. Memasilitasi penempatan kepada pencari kerja dengan perusahaan pemberi kerja secara langsung melalui fasilitasi penempatan dan bursa kerja,
5. Mendorong peningkatan peran Lembaga Kerjasama Bipartit untuk mewujudkan hubungan yang harmonis di perusahaan dan meningkatkan pemahaman pelaksanaan kebijakan ketenagakerjaan sesuai dengan peratauran perundang-undangan
6. Meningkatkan Pembinaan ke perusahaan untuk meningkatkan pemahaman mengenai peraturan ketenagakerjaan.
7. Melakukan penysesuain anggaran dalam APBD Peruabahan dan ada beberpa kegiatan yang membutuhkan tambahan anggaran sehingga perlua dilakukan usulan tambahan anggaran dalam APBD Peruabahan

Untuk itu perlu dilakukan upaya Dinas Tenaga Kerja untuk lebih mendorong kesadaran perusahaan dalam melaksanakan wajib lapor lowongan dan penempatan sehingga dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

2. Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah
   Meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah dengan indikator Nilai AKIP Dinas Tenaga Kerja dari target 83,29 telah terealisasi 78,2 dengan capaian kinerja mencapai 93,88% dengan kataogori BB (sangat Baik),.

NO.	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			Tahun Sebelumnya	Tahun 2025
1	PERENCANAAN KINERJA	30	27.00	27.00
2	PENGUKURAN KINERJA	30	17.70	20.70
3	PELAPORAN KINERJA	15	15.00	13.50
4	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA	25	14.75	17.00
	NILAI AKUNTABILITAS KINERJA	**Rp 100.000**	**74,45**	**78.20**
				BB
				Sangat Baik

Capaian Kinerja nyata indikator " nilai AKIP Dinas Tenaga Kerja" tahun 2025 sebesar 93,88 % meningkat di banding tahun sebelumnya sebesar 3,75 point di bandingkan pencapaian tahun sebelumnya berjumlah 74,45 %. Dari 4 Komponen Penilaian terdapat 2 komponen yang mengalami peningkatan bobot evaluasi yaitu perencanaan kinerja dan pengukuran Kinerja sedangkan 2 komponen yang di evaluasi mengalami peningkatan yaitu Perencanaan Kinerja dan pelaporan Kinerja. Dan terdapat 2 komponen yang mengalami penurunan kinerja yaitu pelaporan kinerja Penurunan pencapaian di sebabkan adanya komponen yang di evalauasi belum optimal dilaksanakan yaitu belum optimalnya pengukuran data capaian kinerja dan pelaporan kinerja berupa laporan kinerja berjenjang eselon III dan IV secara berkala.

Kegagalan pencapaian indikator kinerja sasaran Nilai AKIP Dinas Tenaga Kerja tidak terlepas dari belum optimalnya pelaksanaan SAKIP di Dinas Tenaga Kerja., Selain itu juga dalam rangka pencapaian indikator kinerja sasaran perlu dilakukan penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien dalam mendukung keberhasilan pencapian indikator kinerja sasaran yaitu dengan melaksanakan tugas pokok dan fungsi setiap pegawai dalam mendukung pencapaian program dan kegiatan sesuai dengan yang di rencanakan sehingga mencapai target indikator kinerja sasaran.

Untuk itu Dinas Tenaga Kerja akan memperbaiki atas hasil penilaian LKIP yaitu dengan melakukan upaya perbaikan berupa;

1. Menerapkan implementasi Sakip Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang sesuai berpedoman kepada peratuan dan ketentuan yang berlaku.
2. Melakukan pemantau dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian kinerja secara berkala dan berjenjang sehingga pengukuran kinerja dilaksanakan berdasarkan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan.
3. Dalam penyusunan Renja Dinas Tenga Kerja Kabupaten Tangerang akan menindaklanjuti hasil evaluasi kinerja serta berpedoman kepada Renstra dalam penyusunan program dan kegiatan untuk mendukung keberhasilan pencapian indikaor sasaran.

3. Indikator Kinerja Kunci Dinas Tenaga Kerja

Berdasarkan Aspek dan Indikator Kinerja Menurut Bidang Urusan Penyelenggara Tingkat Outcome Pemerintah Daerah Sesuai dengan Permendagri No. 86 tahun 2017 tentang Tatacara Perencanan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Renacana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Dins Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang telah menetapkan indicator kinerja kunci (IKK)) yang tertuang dalam Renstra Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanerang Tahun 2024-2026 yaitu;

Tabel II.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang

No	Indikator Kinerja Kunci	Standar Nasional	IKK	Kondisi Awal Kinerja	Target Renstra PD			Realisasi		Proyeksi Tahun 2025
				2023**	2024	2025	2026	2023	2024	
1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu rencana tenaga kerja		IKK	100%	100%	100%	100%	100.00	100%	100%
2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi		IKK	4,81%	5,06%	5,32%	5,57%	0.17%	0,13%	5,32%
4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)		IKK	36,54%	36,77%	36,97%	37,15%	56.15%	48,09%	36,97%
5	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja		IKK	68,48%	69,34%	70,27%	71,35%	62.67%	76,73%	70,27%

Pencapaian Inidikator kinerja kunci (IKK) Dinas Tenaga Kerja sebagai bahan pertanggungjawban laporan pertanggung jawban Pemerintah Daerah (LPPD) tahun 2025 terdapat beberapa indikator yang belum mencapai target kinerja yaitu

1. Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi dari target di tahun 2023 sebesar 5,06% terealiasai sebesar 0,13% rendahnya realisasi ini disebabkan data tenaga bersertifikat kompetensi berdasarkan hasil sertifikasi yang dilaksankan dan terdata di Dinas tenaga Kerja selain itu meningkatnya data jumlah tenaga kerja berdasarkan data perusahaan di Kabupaten Tangerang.

2.2 Analisis Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2025

Evaluasi kinerja program dan kegiatan terhadap pelaksanaan realisasi kinerja dan realisasi anggaran yang dilakukan per triwulan sangat penting dilaksanakan sebagai upaya dalam memaksimalkan pencapaian target dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan didalam Renja Disnaker Tahun 2025 Memperhatikan tahapan dan tata waktu dalam rangka penyusunan Perubahan Renja Disnaker Tahun 2025, maka kegiatan evaluasi pelaksanaan Renja Disnaker Tahun 2025 menggunakan laporan realisasi pelaksanaan sampai dengan Triwulan II Tahun 2025. Hasil evaluasi tersebut merupakan data sekaligus informasi terkait permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan program pembangunan yang telah direncanakan dalam Renja dan teranggarkan pada APBD Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2025 serta menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Hasil evaluasi Renja Renja 2025 sampai dengan Triwulan II dijadikan dasar penyusunan Renja Perubahan tahun 2025, dengan memperhatikan realisasi anggaran dan realiasasi target capaian kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang. Evaluasi dilaksanakan untuk mengukur capaian kinerja Disnaker dalam melaksanakan anggaran tahun 2025 Evaluasi mencakup realisasi target capaian kinerja, keluaran program dan kegiatan tahun 2025 sampai dengan triwulan II terhadap Renja Dinas Tenga Kerja, yang bersumber dari hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan realisasi capaian indikator sasaran Renstra Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang.

Adapun evaluasi pelaksanaan renja Dinas Tenaga Kerja sampai dengan triwulan II Tahun 2025

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 11 (sebelas) kegiatan dan 22 (dua puluh dua) Sub Kegiatan dengan pagu anggaran Rp.18.193.512.582,00 dan realisasi angaran Rp. **6.380.105.406**,00 (35,07 %)dan realisasi fisik kegiatan mencapai 50%.. *Pelaksanaan Program* Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota *dengan sasaran kinerja yang ingin dicapai yaitu:*
   a) Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan dari target 100% persen telah terealisasi mencapai 50% sesuai dengan kinerja yang ditargetkan.
2. Program Perencanaan Tenaga Kerja terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) Sub Kegiatan dengan pagu anggaran Rp.83.334.900,00 dan realisasi angaran Rp.0 dan realisasi fisik kegiatan mencapai 0%.. *Pelaksanaan Program* Perencanaan Tenaga Kerja *dengan sasaran kinerja yang ingin dicapai yaitu:*

Persentase Ketersediaan data makro dan Mikro Ketenagakerjaan dengan target kinerja 100% relaisasi 0, program akan dilaksanakan pada triwulan IV

3. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja terdiri dari 4 (empat) Kegiatan dan 6 (enam) Sub Kegiatan, dengan jumlah angaran sebesar Rp. **15.249.465.980,00** dengan realisasi anggaran Rp. 1.702.407.800,00 mencapai 11,16%.
   Pelaksanaan Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja dengan sasaran kinerja yang ingin dicapai yaitu:
   a) Persentase lulusan Pelatihan yang kompeten dengan target 75 % realisasi mencapai 11,23 % dengan capaian 13,33% Dimana lulusan pelatihan yang lulus uji kompetensi berjumlah 75 orang dari target yang disertifikasi 668 orang pertahun
   b) Jumlah Lembaga Pelathian Kerja (LPK) yang terakreditasi dengan target 35 Lembaga belum realisasi 0 lembaga..

   Rendahnya capaian kinerja program ini disebabkan :
   a) Lulusan pelatihan yang lulus uji kompetensi baru berjumlah 75 orang dari target 668 orang di karenakan masih dalam proses sertifikasi dan membutuhkan waktu untuk mendapatkan data kelulusan uji kompetensi dari lembaga sertifikasi profesi yang melaksanakan test uji kompetensi.
   b) Lembaga Pelatihan kerja yang terakreditasi dilaksankaan oleh Propinsi Banten dan datanya akan di peroleh setelah proses akreditasi selesai.

4. Program Penempatan Tenaga Kerja terdiri dari 4 (empat) Kegiatan, 9 (sembilan) Sub Kegiatan, dengan jumlah angaran sebesar Rp.2.256.396.620,00 dengan realisasi anggaran Rp. 579.687.500,00 mencapai 15,09%.
   Didalam pelaksanaan Program Penempatan Tenaga Kerja dengan sasaran yang ingin dicapai adalah;
   a) Persentase penempatan tenaga kerja berdasarkan lowongan kerja terdaftar dari target 96,87% orang pencari kerja *yang ditempatkan telah teraalisasi 25,09% atau mencapai 17 % dimana jumlah pencari kerja di tempatkan 7559 orang dari lowongan kerja terdaftar pertahun di proyeksikan berjumlah 29.217 orang.*
   b) Jumlah Witra Usaha Baru dari target 6600 orang baru terealisasi 112 orang atau 17%

   Belum Optimalnya capaian tersebut sebabkan
   a) Masih terdapat perusahaan yang belum melaporkan lowongan dan penempatan tenaga kerja hasil seleksi perusahaan.
   b) Lowongan kerja yang tersedia tidak sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan perusahaan

5. Program Hubungan Industrial terdiri dari 2 (dua) Kegiatan dan 7 (tujuh) Sub Kegiatan, dengan jumlah angaran sebesar Rp. 2.617.026.850,- realisasi keuangan mencapai Rp. 1229672240,- (1191%) . dengan Outcome yang ingin dicapai adalah:

a) Angka sengketa pengusaha dan pekerja pertahun dari target 1,25 % telah terealisasi 0,8 % dengan capaian kinerja 64%, dimana dari jumlah PHI yang terdaftar berjumlah 88 kasus dari jumlah perusahaan 6.323 *perusahaan.*

6. Program Pembangunan kawasan transmigran terdiri dari 1 Kegiatan dan 1 Sub kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 34.741.630 relaisasi -, dengan indicator yang ingin dicapai yaitu Jumlah animo masyarakat bertransmigran berjumlah 7 KK relaisasi 0, belum terealisasinya disebablan menunggun kuota transmigran dari Kementerian Desa dan Transmigrasi.

Berikut disajikan tabel hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah tahun 2025 sampai dengan triwulan II

Tabel II.4
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD s/d triwulan II
Tahun 2025 Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Reallisasi anggaran	Persentase (%)	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Realisasi Presentase
2,07,01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	18.193.512.582	**6.380.105.406**	35,07	**Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan**	**Persen**	**100**	**50**	**50**
2.07.01.2.01	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	123.531.900	**27.075.000**	21,92	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Dokumen**	**9**	**4**	**44**
2.07.01.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	111.679.950	23.910.000	21,41	Jumlah dokumen perencanaan perangkat Daerah	Dokumen	4	2	50
2.07.01.2.01.06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.193.950	3.165.000	44,00	Jumlah laporan capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan Capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dokumen	1	1	100
2.07.01.2.01.07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.658.000	0	0,00	Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	4	2	50
2.07.01.2.02	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	12.608.502.790	**5.045.377.986**	40,02	Jumlah dokumen adminstrasi keuangan	Dokumen	**2**	**2**	**100**
2.07.01.2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.601.767.790	5.043.122.986	40,02	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang/Bulan	35	35	88
2.07.01.2.02.07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	6.735.000	2.255.000	33,48	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan laporan Koordinasi penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Laporan	1	1	100

2.07.01.2.03	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	293.762.400	**11.718.000**	3,99	Jumlah dokumen Pembinaan Pegawai	Dokumen	**3**	**1**	33
2.07.01.2.03.02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya	71.154.000	11.718.000	16,47	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut perlengkapannya	Paket	2	2	100
2.07.01.2.03.08	Sub Kegiatan Bimbingan tekhnis implementasi peraturan perundang-undangan	190.108.400	0	0,00	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan tekhnis implementasi peraturan perundang-undangan	Orang	5	0	0
2.07.01.2.03.09	Sub Kegiatan pendidikan dan pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	32.500.000	0	0,00	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	60	0	0
2,07,01,2,06	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	1.425.655.400	**196.634.400**	13,79	Jumlah dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen	**7**	**4**	53
2.07.01.2.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	26.997.000	0	0,00	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	1	100
2.07.01.2.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	661.980.800	0	0,00	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	6	0	0
2.07.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	21.681.400	0	0,00			1	0	0
2.07.01.2.06.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	161.790.100	139.299.400	86,10	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	2	2	100
2.07.01.2.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	55.129.500	37.810.000	68,58	Jumlah paket barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Paket	2	2	100
2.07.01.2.06.08	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	79.351.000	10.200.000	12,85	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	12	6	50

2.07.01.2.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	418.725.600	9.325.000	2,23	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat korrdinasi dan konsultasi SKPD	Laporan	12	6	50
2.07.01.2.08	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	2.880.034.568	**965.715.172**	33,53	Jumlah dokumen Jasa Penunjang	Dokumen	**3**	**2**	67
2.07.01.2.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.072.005.000	265.892.172	24,80	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	6	50
2.07.01.2.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.808.029.568	699.823.000	38,71	Jumlah lapoaran penyediaan jasa pelayanan umum dan kantor yang disediakan	Laporan	12	6	50
2.07.01.2.09.01	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	862.025.524	**133.584.848**	15,50	Jumlah dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	**5**	**2**	40
2.07.01.2.09.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	214.805.964	51.094.848	23,79	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	5	3	60
2.07.01.2.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perijinan Kendaraan Kendaraan Dinas opersional atau lapangan	250.619.560	73.210.000	29,21	Jumlah kendaraan dinas oprasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya dan perijinannya	Unit	9	4	44
2.07.01.2.09.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	112.900.000	9.280.000	8,22	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	60	30	50
2.07.01.2.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	196.500.000	0	0,00	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	100

2.07.01.2.09.11	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	87.200.000	0	0,00	Jumlah Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipeliharan dan di rehabilitasi	Unit	1	0	0
2.07.02	**PPROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**	83.334.900	**0**	0,00	**Persentase Ketersediaan data makro dan mikro ketenagakerjaan**	**Persen**	**100**	**0**	**0**
2.07.02.01	**Kegiatan Penyusunan Renacana Tenaga Kerja (RTK)**	83.334.900	**0**	0,00	**Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja (RTK)**	**Dokumen**	21	**0**	**0**
2.07.02.01.01	Sub Kpenyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	26.572.500	**0**	0,00	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	Dokumen	1	0	**0**
2.07.02.01.02	Sub Kpenyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	56.762.400	**0**	0,00	Jumlah perusahaan yang menyusun RTK Mikro	Perusahaan	20	0	**0**
2.07.03	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	15.249.465.980	**1.702.407.800**	11,16	**Persentase lulusan Pelatihan yang kompeten**	**Persen**	**75**	**11,23**	**15**
					Jumlah Lembaga Pelathian Kerja (LPK) yang terakreditasi	**Lembaga**	**35**		**0**
2.07.03.2.01	**Kegiatan Pelaksanaan Pelatihahn Berdasarkan Unit Kompetensi**	14.910.959.380	**1.617.376.200**	10,85	**Jumlah pencari kerja yang memiliki kompetensi**	**Orang**	**1744**	352	**18**
2.07.03.2.01.01	Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	7.875.387.280	1.518.712.200	19,28	Jumlah Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan Kompetensi pada tahun n	Orang	1744	352	**18**
2.07.03.2.01.02	Sub Kegiatan Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerjasama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	405.569.000	1.020.000	0,25	Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana pelatihan kerja	Unit	5	2	**40**

2.07.03.2.01.03	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	6.630.003.100	97.644.000	1,47	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas	Lembaga	100	40	**40**
2.07.03.2.02	**Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta**	292.146.600	**78.401.600**	26,84	**Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang di bina**	**Lembaga**	**40**	**20**	**50**
2.07.03.2.02.01	Sub Kegiatan Pembinaaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	292.146.600	78.401.600	26,84	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang dibina	Lembaga	40	20	**50**
2.07.03.2.04	**Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil**	29.308.000	**6.630.000**	22,62	**Jumlah perusahaan kecil yang mendapat konsultasi peningkatan produktivitas**	**Perusahaan**	**320**	**150**	**47**
2.07.03.2.04.01	Konsultasi Produktivitas pada Perusahan Kecil	29.308.000	6.630.000	22,62	Jumlah perusahaan kecil yang mendapat konsultasi peningkatan produktivitas	Perusahaan	320	150	**47**
2.07.03.2.05	**Kegiatan Pengukuran Produktivitas Tingkat daerah Kabupaten/Kota**	17.052.000	**0**	0,00	**Jumlah Dokumen hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah**	**Dokumen**	**1**	**1**	**100**
2.07.03.2.05.03	Sub Kegiatan Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	17.052.000	**0**	0,00	Jumlah Dokumen hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	Dokumen	1	1	**100**
2.07.04	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	2.256.396.620	**579.687.500**	15,09 #DIV/0!	**Persentase Penempatan Tenaga Kerja berdasarkan Lowongan Kerja yang Terdaftar**	**Persen**	**96,87**	**37,8**	**39**
					Jumlah Wirausaha Baru	**Orang**	**660**	192	**29**
2.07.04.2.01	**Kegiatan Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota**	2.256.396.620	**226.259.500**	10,03	**Jumlah pencari kerja dan pemberi kerja yang terlayani dalam pelayanan antar kerja**	**Orang**	**40000**	**10942**	**27**

2.07.04.2.01	Sub Kegiatan Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antara Kerja	189.424.000	155.282.000	81,98	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang mendapatkan pelatihan melalui bimtek dan lain-lain untuk peningkatan kompetensi	Orang	70	70	**100**
2.07.04.2.02	Sub Kegiatan Pelayanan Antar Kerja	169.195.000	25.817.500	15,26	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan melalui layanan AKAD dan AKL	Orang	20000	7559	**38**
2.07.04.2.03	Sub Kegiatan Penyuluhan Bimbingan Jabatan Bagi Pencari Kerja	68.980.000	45.160.000	65,47	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan penyuluhan dan bimbingan jabatan	Orang	400	300	**75**
2.07.04.2.04	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Unit Layanan Disabbilitas Kabupaten/Kota	23.250.000	0	0,00	Jumnlah Pencari kerja disabilitas yang ,mendapatkan Fasilitasi layanan ULD	Orang	50	45	**90**
	Sub Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja	1.805.547.620	0	0,00	Jumlah tenaga kerja yang diberdayakan melalui program perluasan kesempatan kerja	Orang	560	112	**20**
2.07.04.2.02	**Kegiatan Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	160.463.400	**42.298.000**	26,36	**Jumlah lembaga Penempatan yang dterbitkan perijinan dan dilakukakn pengawasan dan pengendalian**	**Lembaga**	**150**	**120**	**80**
2.07.04.2.02.02	Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	160.463.400	42.298.000	26,36	Jumlah LPTKS yang di lakukan pengawasan dan pengendalian sesuai dengan aturan yang berlaku	lembaga	150	120	**80**
2.07.04.2.03	**Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**	867.598.800	**311.130.000**	35,86	**Jumlah lowongan pekerjaan yang tersedia**	**Lowongan**	**20000**	**5049**	**25**
2.07.04.2.03.01	Sub Kegiatan Pemeliharaan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	242.117.000	51.000.000	21,06	Jumlah data dan Informasi yang dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Dokumen	2	1	**50**

2.07.04.2.03.02	Sub Kegiatan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	86.128.000	0	0,00	Jumlah pencari kerja dan pemberi kerja yang terdaftar dalam pasar kerja melalui sistem online (karier Hub)	Orang	40000	**10942**	**36**
2.07.04.2.03.03	Sub Kegiatan Job Fair/Bursa Kerja	539.353.800	260.130.000	48,23	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan melalui Job Fair/Bursa Kerja	Orang	500	0	**0**
2.07.04.2.04	**Kegiatan Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota**	556.196.100	**0**	0,00	**Jumlah Perlindungan CPMI dan PPMI (pra dan Purna Penempatan) di daerah Kab/Kota**	**Orang**	**320**	**240**	**75**
2.07.04.2.04.01	Sub Kegiatan Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Pekerja Migran Indonesia	358.075.000	0	0,00	Jumlah CPMI/PMI yang dilindungi dan ditingkatkan kompetensinya	Orang	232	160	**69**
2.07.04.2.04.03	Sub Kegiatan Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	198.121.100	0	0,00	Jumlah PMI purna yang diberdayakan	Orang	80	80	**100**
2.07.05	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	2.617.026.850	**1.229.672.240**	46,99	**Angka sengketa Pengusaha-pekerja per tahun**	**Persen**	**1,25**	0,80	**64**
2.07.05.2.01	**Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	476.602.650	**178.761.400**	37,51	**Jumlah Perusahaan yang menyusun Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Perusahaan**	**185**	**80**	**59**

2.07.05.2.01.01	Sub Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	33.500.000	0	0,00	Jumlah perusahaan yang melaksanakan pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial dan terdaftar di WLKP Online	Perusahaan	135	60	**44**
2.07.05.2.01.02	Sub Kegiatan Pendaftaran perjanjian kerja sama bagi perusahaan	33.500.000	0	0,00	Jumlah Perusahaan yang menyusun Perjanjian Kerja Bersama	Perusahaan	50	15	**30**
2.07.05.2.01.03	Sub Kegiatan Penyelengaraan Pendataan dan Informasi Sarana hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Pengupahan	409.602.650	178.761.400	43,64	Jumlah Data dan informasi sarana hubungan Industrial (PP/PKB), Struktur Skalla Upah dan LKS Bipartit) dan Pekerja terdaftar sebagai peserta Jamsostek serta Pengupahan	Laporan	1	0	**0**
2.07.05.2.02	**Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota**	2.140.424.200	**1.050.910.840**	49,10	**Jumlah pencegahan dan penyelesaian Perselisihan hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/kota**	**Perkara**	**300**	**135**	**45**
2.07.05.2.02.01	Sub Kegiatan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan Yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	809.744.600	95.400.000	11,78	Jumlah perselisihan yang di cegah	Perkara	100	47	**47**
2.07.05.2.02.02	Sub Kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan Yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	84.949.280	4.494.000	5,29	Jumlah perkara Perselisihan yang diselesaikan	Perkara	200	88	**44**
2.07.05.2.02.03	Sub Kegiatan Penyelenggareaan verifikasi dan rekapitulasi keanggotaan pada organisasi pengusaha, Federasi, dan Konfederasi serikat Pekerja/Serikat Buruh serta non afilasi	14.987.400	14.037.400	93,66	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang diverifikasi	Asosiasi dan Serikat Pekerja	34	21	**62**

2.07.05.2.02.04	Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	1.195.264.920	936.979.440	78,39	Jumlah LKS Tripartit yang dibina	Lembaga	1	1	**100**
2.07.05.2.02.05	Sub Kegiatan Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitasi Kesejahteraan Pekerja	35.478.000	0	0,00	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitasi Kesejahteraan Pekerja	Orang	100	0	**0**
3.32	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**		**0**	0,00					
3.32.03	**PPROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRAN**	34.741.630	**0**	0,00	**Jumlah animo masyarakat bertransmigran pada tahun n**	**KK**	**8**	0	0
3.32.03.2.01	**Kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	34.741.630	**0**	0,00	**Jumlah Calon Transmigran yang Terdaftar, Terseleksi Administrasi dan Teknisnya**	**KK**	**7**	0	0
3.32.03.2.01.11	Sub Kegiatan Pendaftaran, Seleksi Administrasi dan Seleksi Teknis Calon Transmigran Penduduk Asal	34.741.630	**0**	0,00	Jumlah Calon Transmigran yang Terdaftar, Terseleksi Administrasi dan Teknisnya	KK	7	0	0

Dinas Tenaga Kerja Tahun anggaran 2025 mendapatkan pagu anggaran Rp. **40.018.736.862,00** dengan realisasi anggaran Rp **9.891.872.946,00** sebesar 24,72 % sehingga sisa anggaran anggaran berjumlah Rp. **30.126.863.916,00** tidak optimalnya penyerapan anggaran di triwulan tahun 2025 disebabkan:

1. Belanja Pegawai disebabkan adanya potongan kinerja. Mutasi staf dan belum terserapnya anggaran CPNS dan P3K yang telah di anggarakan.
2. Pencairan anggaran disesuaikan dengan kebutuhan seperti biaya listrik dimana kebutuhan pemakakian listrik BLK belum optimal disebabkan belum berjalannya pelaksanaan BLK Kosambi dan SPPD serta service kendaraan
3. Transisi e catalog versi 5 ke versi 6 menghambat proses pengadaan
4. Adanya selisih harga penawaran pengadaan barang dan jasa.

Untuk itu dalam pelaksanaan program dan kegiatan di triwulan selanjutnya permasalahan tersebut dapat diatasi dengan memaksimalkan pelaksanaan program dan kegiatan, selain itu juga agar PPTK kegiatan dapat melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Untuk jelasnya dapat kami disamppaiakn evaluasi program dan kegiatan tahun 2025;

Realisasai anggaran Dari hasil pelaksanaan kegiatan sampai dengan triwulan II tahun 2025 terdapat bebarapa hal yang menjadi perhatian pelaksanaan program dan kegiatan untuk memenuhi target Renstra yaitu:

1. Memaksimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam mendukung pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan program dan kegiatan agar dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah direncanankan dalam DPA.
3. Adanya penyesuaian dan pergeseran anggaran sub kegiatan dalam APBD Perubahan

Dalam rangka mendukung pelakanaan program dan kegiatan tahun 2025 masih terdapat beberapa ke butuhan yang harus dialokasikan dalam APBD Perubahan hal ini disebabkan adanya beberapa kegiatan yang masih membutuhkan tambahan anggaran yaitu :

1. Kebutuhan Anggaran untuk sarana dan prasana kantor
2. Fasilitasi Kegiatan Dewan Pengupahan Kabupaten Tangerang
3. Fasilitasi kegiatan LKS Tripartit Kabupaten Tangerang
4. Kebutuhan untuk belanja pegawai

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Masalah utama yang dihadapi oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang yaitu tingginya angka pengangguran sebagai akibat bertambahnya angakatan kerja baru maupun adanya PHK di perusahaan Tingginya angka pengangguran akan berdampak sangat luas jika tidak dapat ditangani oleh Pemerintah daerah Kabupaten Tangerang.

Selain masalah utama tersebut Dinas Tenaga kerja Kabupaten Tangerang menghadapai berbagai permasalahan dan hambatan yang dihadapai dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi perangkat daerah yaitu kualifikasi dan kompetensi angkatan kerja yang tidak sesuaidengan kesempatan kerja yang tersedia, Terbatasnya kesempatan kerja yang tersedia di perusahaan sebagai akibat kurangnya kesadaran perusahaan dalam melaksanakan wajib lapor lowongan dan meningkatnya kasus Perselisihan Hubungan Industrial (PHI)

Dalam menjalalankan tugas pokok dan fungsi penyelenggaran pemerintahan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang seringkali menghadapi isu-isu strategis yang dapat menghambat atau mengurangi target kinerja OPD. Isu-isu strategis yang di hadapi oleh Dinas Tenaga Kerja yaitu:

1. Peningkatan daya saing tenaga kerja
2. Peningatan penempatan tenaga kerja
3. Peningkatan Hubungan Industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan
4. Peningkatan pelayanan publik

Sebagai tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan dan isu tersebut Dinas Tenaga Kerja akan merencanakan program dan kegiatan dengan menitikberatkan sasaran pembangunan ketenagakerjaan yaitu :

1. Meningkatkan kompetensi pencari kerja
2. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja
3. Meningkatnya hubungan industrial yang harmonis serta perlindungan tenaga kerja
4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang akuntabel

Untuk mengatasi permasalahan tersebut perlu di dukung oleh program dan kegiatan yang berkesinambungan sehingga dalam penyusunan Renja Perubahan Tahun 2025 Dinas Tenaga Kerja lebih memprioritaskan penanganan permasalahan tersebut.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam menetapkan indikator kinerja dan sasaran kegiatan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang berpedoman pada arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasioanal oleh Kementerian Ketenagakerjaan RI yang di tuangkan dalam Renstra Dinas Tenaga Kerja 2024-2026 serta sesuai dengan Sasaran Pembangunan Pemerintah Kabupaten Tangerang yang tertuang dalam RPD Kabupaten Tangerang tahun 2024-2026. Oleh karena itu dalam penyusunannya memperhatikan dan mensinergikan dengan Renstra Kementerian Ketenagakerjaan RI tahun 2020-2024.

Tabel III.1
Keterkaitan Renstra Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang dan Renstra Kementerian Ketenagakerjaan RI

Renstra Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang 2024-2026	Renstra Kementerian Ketenagakerjaan RI 2020-2024
Sasaran Strategis	
Meningkatkan ketersediaan tenaga kerja yang kompeten sesuai kebutuhan pasar kerja Penempatan Tenaga Kerja	Meningkatnya tenaga kerja yang berdaya saing dan hubungan industrial yang kondusif dalam menghadapi pasar kerja yang fleksibel
Meningkatnya akuntabilitas Perangkat Daerah	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik

Berdasarkan hal tersebut prioritas pembangunan nasional bidang ketenagakerjan yang akan di laksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat Daerah meliputi :

1. Meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja melalui pelatihan
2. Menngkatkan volume penyerapan tenaga kerja melalui fasilitasi penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja/berusaha
3. Memperbaki iklim ketenagakerjan dan menciptakan hubungan industrial yang harmonis dengan memberikan pembinaan penyusunan sarana hubungan industrial di perusahaan serta dapat meyelesaikan kasus PHI sesuai denga SOP yang telah di tentukan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja

Berdasarkan Peraturan Bupati Tangerang Peraturan Bupati Tangerang Nomor tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang, bahwa tugas pokok Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang adalah : merencanakan, melaksanakan, urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi sesuai dengan kewenangan dan kebijakan Pemerintah Daerah.

Untuk melaksanankan tugas pokok diatas Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang mempunyai fungsi :

a. Merumuskan program kerja DinasTenaga Kerja; Mengkoordinasikan pelaksanaan program kerja Dinas Tenaga Kerja;
b. Membina kinerja aparatur dilingkungan Dinas Tenaga Kerja;
c. Mengarahkan pelaksanaan program kerja mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku;
d. Menyelenggarakanprogram kerja Dinas Tenaga Kerja;
e. Mengevaluasi hasil pelaksanaan program kerja Dinas Tenaga Kerja; dan
f. Melaporkan pelaksanaan program kerja kepada Bupati.

Dalam RPD Kabupaten Tangerang tahun 2024-2026 Dinas Tenaga Kerja mendukung pencapaian pada misi ke 2 (dua) yaitu "Mewujudkan perekonomian daerah yang maju dan berdaya saing berbasis pada potensi keunggulan lokal" dengan tujuan Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara komprehensif dan sasaran meningkatnya daya saing tenaga kerja. Untuk mendukung tujuan dan sasaran Daerah pada RPD 2024-2026 maka Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang menetapkan tujuan perangkat daerah yaitu:

Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja

Indikator kinerja adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), yang digunakan untuk mengukur persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara/wilayah. Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian.

Sedangkan Sasaran Perangkat Daerah (PD) merupakan hasil yang akan dicapai dari tujuan yang di formulisaikan secara terukur, spesifik, rasional untuk di laksanakan dalam jangka waktu tertentu. Untuk mencapai tujuan yang telah di rumuskan pada periode RPD 2024-2026, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang menetapkan sasaran Strategis jangka menengah yang ingin dicapai sesuai dengan tugas. pokok dan fungsi yaitu;

1. Tujuan Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja terdiri dari 2 (dua) sasaran yaitu:

   a. Meningkatnya ketersediaan tenaga kerja yang kompeten sesuai kebutuhan pasar kerja.

   Dengan indikator Persentase Tenaga kerja ditempatkan, yang digunakan untuk mengukur persentase penempatan pencari kerja yang terdaftar dan terdata di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang.

   b. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

   Dengan indikator Nilai SAKIP Dinas Tenaga Kerja, yang digunakan untuk mengetahui sejauhmana implementasi SAKIP mulai dari perencanaan kinerja (jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek), penerapan anggaran berbasis kinerja,

pengukuran kinerja dan monitoring pengelolaan data kinerja hingga pada pelaporan hasil kinerja serta evaluasi atas pencapaian kinerja.

Tujuan, sasaran dan target kinerja jangka menengah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang Tahun 2024 beserta indkator kinerjanya di sajikan dalam table.

Tabel III.2
Target Sasaran dan Indikator sasaran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang Tahun 2025

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Target Kinerja 2024
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	68,25 Persen
1.1		Meningkatnya ketersediaan tenaga kerja yang Kompeten sesuai kebutuhan pasar kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan	70,25 Persen
1.2		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Dinas Tenaga kerja	83,29

3.3 Program dan Kegiatan Dalam Perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja

Dalam APBD murni tahun 2025 Dinas Tenaga Kerja mempunyai anggaran Sebesar RP. 39.668.666.822,00 terdiri dari 6 Program, 18 Kegiatan dan 49 Sub Kegiatan. dalam APBD Perubahan tahun 2025 Dinas Tenaga Kerja mendapatkan alokasi tambahan anggaran dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) Kabupaten Tangerang . Sehingga di anggaran perubahan tahun 2025 jumlah pagu Dinas Tenaga Kerja menjadi Rp. 40.586.537.377,00 bertambah Rp. 917.870.555,00

Dalam APBD Perubahan Tahun 2024 terdapat penambahan anggaran yang diprioritaskan untuk :

1. Belanja Pegawai yang digunakan untuk belanja gaji dan tunjangan PNS Dinas Tenaga Kerja,
2. Honor non ASN untuk pembayaran gaji THR dan Gaji 13
3. Kegiatan Dewan Pengupahan Kabupaten Tangerang dan LKS Tripartit Kabupaten Tangerang
4. Penyesuaian Sub kegiatan untuk Pengadaan sarana dan prasarana kebutuhan pelatihan dan sarana prassarana Kantor

Adapaun Rincian program dan Kegiatan dalam anggaran Perubahan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang Tahun 2025 yaitu

Table III.3
Rencana Program dan Kegiatan Anggaran Perubahan Dinas Tenaga Kerja Tahun 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA KERJA MURNI			RENCANA KERJA PERUBAHAN		BERTAMBAH BERKURANG
				TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (9-6)
		DINAS TENAGA KERJA							
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							
	2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**			39.626.417.192,00			40.551.795.747,00	925.378.555,00
1,	**2.07.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan**	**100 Persen**	18.700.414.612,00		**100 Persen**	19.156.576.057,00	456.161.445,00
	2.07.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	***Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah***	**9 Dokumen**	**157.133.630,00**		**9 Dokumen**	**118.331.900,00**	**(38.801.730,00)**
	2.07.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	5 Dokumen	134.335.950,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5 Dokumen	106.479.950,00	(27.856.000,00)
	2.07.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	1 Laporan	12.469.950,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Laporan	7.193.950,00	(5.276.000,00)

	2.07.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	4 Laporan	10.327.730,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4 Laporan	4.658.000,00	(5.669.730,00)
	2.07.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	***Jumlah dokumen administrasi keuangan***	**2 Dokumen**	**12.611.962.790,00**		**2 Dokumen**	**12.735.915.385,00**	**123.952.595,00**
	2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	40 Orang/b ulan	12.601.767.790,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	40 Orang/b ulan	12.729.180.385,00	127.412.595,00
	2.07.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD*	1 Laporan	10.195.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Laporan	6.735.000,00	(3.460.000,00)
	2.07.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	***Jumlah dokumen pembinaan pegawai***	**3 Dokumen**	**307.399.200,00**		**3 Dokumen**	**3.071.046.400,00**	**(2.952.800,00)**
	2.07.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*	1 Paket	71.154.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Paket	71.154.000,00	0,00
	2.07.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*	5 Orang	32.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5 Orang	32.500.000,00	0,00
	2.07.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*	73 Orang	203.745.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	73 Orang	200.792.400,00	(2.952.800,00)

	2.07.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	***Jumlah Dokumen administrasi umum Perangkat Daerah***	**6 Dokumen**	**1.881.858.900,00**		**6 Dokumen**	**2.115.313.780,00**	**233.454.880,00**
	2.07.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	1 Paket	26.997.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Paket	26.997.000,00	0,00
	2.07.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	4 Paket	661.980.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8 Paket	1.327.394.380,00	665.413.580,00
	2.07.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Ru,ahy Tangga	*Jumlah Paket Peralatan dan rumah tangga yang Disediakan*	1 Paket	21.681.400,00			24.891.400,00	3.210.000,00
	2.07.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	1 Paket	161.790.100,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Paket	166.178.500,00	4.388.400,00
	2.07.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	1 Paket	69.410.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Paket	55.129.500,00	(14.280.500,00)
	2.07.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	12 Laporan	105.850.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Laporan	79.351.000,00	(26.499.000,00)
	2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	150 Laporan	834.149.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Laporan	435.372.000,00	(398.777.600,00)
	2.07.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	***Jumlah dokumen jasa penunang***	**3 Dokumen**	**2.880.034.568,00**		**3 Dokumen**	**3.020.434.568,00**	**140.400.000,00**

	2.07.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	12 Laporan	1.072.005.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Laporan	1.072.005.000,00	0,00
	2.07.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	12 Laporan	1.808.029.568,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Laporan	1.948.429.568,00	140.400.000,00
	2.07.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	***Jumlaj dokumen pemeliharaan barang milik daerah penunjang Pemerintah Daeah***	**4 Dokumen**	**862.025.524,00**		**4 Dokumen**	**862.134.024,00**	**108.500,00**
	2.07.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*	5 Unit	214.805.964,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5 Unit	210.414.464,00	(4.391.500,00)
	2.07.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	9 Unit	250.619.560,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	9 Unit	250.619.560,00	0,00
	2.07.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	60 Unit	112.900.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	60 Unit	117.400.000,00	4.500.000,00
	2.07.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	1 Unit	196.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Unit	196.500.000,00	0,00

	2.07.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	1 Unit	87.200.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Unit	87.200.000,00	0,00
2,	**2.07.02**	**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**	**Persentase Ketersediaan data makro dan mikro ketenagakerjaan**	**100 Persen**	**112.751.900,00**		**100 Persen**	**56.762.400,00**	**(55.989.500,00)**
	2.07.02.2.01	**Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)**	***Jumlah dokumen Rencana Tenaga Kerja RTK)***	**21 Dokumen**	**112.751.900,00**		**20 Dokumen**	**56.762.400,00**	**(55.989.500,00)**
	2.07.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	*Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro*	1 Dokumen	37.055.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Dokumen	0,00	(37.055.000,00)
	2.07.02.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	*Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro*	20 Orang	75.696.900,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	20 Orang	56.762.400,00	(18.934.500,00)
3,	**2.07.03**	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**Jumlah Lembaga Pelathian Kerja (LPK) yang terakreditasi Persentase lulusan Pelatihan yang kompeten**	**35 Lembaga 75 Persen**	843.213.600,00		**35 Lembaga 75 Persen**	736.575.600,00	(106.638.000,00)
	2.07.03.2.01	**Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi**	***Jumlah pencari kerja yang memiliki kompetensi***	**2000 Orang**	**422.699.000,00**		**1744 Orang**	**404.569.000,00**	**(18.934.500,00)**

	2.07.03.2.01.0002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	*Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n*	5 Lembaga	422.699.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5 Lembaga	404.569.000,00	(18.934.500,00)
	2.07.03.2.02	**Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta**	***Jumlah Lembaga pelatihan Kerja yang dibina***	**50 Lembaga**	**357.344.600,00**		**60 Lembaga**	**292.146.600,00**	**(65.198.000,00)**
	2.07.03.2.02.0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	*Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina*	50 Lembaga	357.344.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	60 Lembaga	292.146.600,00	(65.198.000,00)
	2.07.03.2.04	**Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil**	***Jumlah perusahaan kecil yang mendapat peningkatan produktivitas***	**320 Perusah aan**	**38.275.000,00**		**300 Perusah aan**	**25.308.000,00**	**(12.967.000,00)**
	2.07.03.2.04.0001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	*Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas*	25 Perusah aan	38.275.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	300 Perusah aan	25.308.000,00	(12.967.000,00)
	2.07.03.2.05	**Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	***Jumlah dokumen hasil pengukuran produktivitas da daya saing tenaga kerja di tingkat Daerah***	**1 Dokumen**	**24.895.000,00**		**1 Dokumen**	**14.552.000,00**	**(10.343.000,00)**
	2.07.03.2.05.0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	*Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah*	1 Dokumen	24.895.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Dokumen	14.552.000,00	(10.343.000,00)

4,	**2.07.04**	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**Jumnlah Wira Usaha Baru Persentase Penempatan Tenaga Kerja berdasarkan Lowongan Kerja yang Terdaftar**	**660 Orang 96.87 Persen**	**4.132.414.470,00**		**672 Orang 96,87 Persaen**	**3.609.263.320,00**	**(523.151.150,00)**
	2.07.04.2.01	**Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota**	***Jumlah pencari kerja dan pemberi kerja yang terilayan dalam sistem antar kerja***	**40000 Orang**	**2.431.395.820,00**		**40000 Orang**	**2.191.134.620,00**	**(240.261.200,00)**
	2.07.04.2.01.0001	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	*Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi*	70 Orang	193.824.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	70 Orang	157.282.000,00	(36.542.000,00)
	2.07.04.2.01.0002	Pelayanan antar Kerja	*Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL*	27200 Orang	257.250.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	20000 Orang	166.275.000,00	(90.975.000,00)
	2.07.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	*Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan*	300 Orang	78.640.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	500 Orang	47.780.000,00	(30.860.000,00)
	2.07.04.2.01.0004	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	*Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD*	50 Orang	32.656.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	50 Orang	23.250.000,00	(9.406.000,00)
	2.07.04.2.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja	*Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja*	660 Orang	1.869.025.820,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	592 Orang	1.796.547.620,00	(72.478.200,00)

	2.07.04.2.02	**Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	***Jumlah lembaga penempatan yang diterbitkan perijinan dan dilakukan pengawasan dan pengendalian***	**75 Lembaga**	**184.689.400,00**		**150 Lembaga**	**142.463.400,00**	**(42.226.000,00)**
	2.07.04.2.02.0002	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	*Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku*	150 Lembaga	184.689.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	150 Lembaga	142.463.400,00	(42.226.000,00)
	2.07.04.2.03	**Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**	***Jumlah lowongan kerja yang tersedia***	**20000 Lowongan**	**946.010.800,00**		**20000 Lowongan**	**726.369.200,00**	**(219.641.600,00)**
	2.07.04.2.03.0001	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	*Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online*	2 Dokumen	243.627.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Dokumen	225.117.000,00	(18.510.000,00)
	2.07.04.2.03.0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	*Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)*	30000 Orang	119.440.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	30000 Orang	86.128.000,00	(33.312.000,00)
	2.07.04.2.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja	*Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja*	500 Orang	582.943.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	500 Orang	415.124.200,00	(167.819.600,00)
	2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah perlindungan CPMI dan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kab/Kota*	320 Orang	570.318.450,00		320 Orang	549.296.100,00	(21.022.350,00)

	2.07.04.2.04.0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	*Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya*	232 Orang	366.120.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	232 Orang	352.075.000,00	(14.045.000,00)
	2.07.04.2.04.0003	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	*Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan*	80 Orang	204.198.450,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	80 Orang	197.221.100,00	(6.977.350,00)
5,	**2.07.05**	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**Angka sengketa Pengusaha-pekerja per tahun**	**1.25 Persen**	2.909.097.130,00		**1.25 Persen**	2.821.638.400,00	(87.458.730,00)
	2.07.05.2.01	**Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	***Jumlah Perusahaan yang menyusun Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 9satu) Daerah Kabupaten/Kota***	**185 Perusa haan**	**517.285.650,00**		**185 Perusa haan**	**594.893.200,00**	**77.607.550,00**
	2.07.05.2.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	*Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online*	135 Perusa haan	42.372.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	135 Perusa haan	29.000.000,00	(13.372.000,00)
	2.07.05.2.01.0002	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	*Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama*	50 Perusa haan	42.726.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	50 Perusa haan	29.000.000,00	(13.726.000,00)
	2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	*Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan*	1 Laporan	432.187.650,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Laporan	536.893.200,00	104.705.550,00

	2.07.05.2.02	**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota**	***Jumlah pencegahan dan perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota***	**300 Perkara**	**2.391.811.480,00**		**400 Perkara**	**2.226.745.200,00**	**(165.066.280,00)**
	2.07.05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Perselisihan yang Dicegah*	100 Perkara	931.271.360,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	200 Perkara	804.744.600,00	(126.526.760,00)
	2.07.05.2.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan*	200 Perkara	130.879.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	200 Perkara	84.949.280,00	(45.930.520,00)
	2.07.05.2.02.0003	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	*Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi*	35 Asosiasi dan Serikat Pekerja	14.987.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	35 Asosiasi dan Serikat Pekerja	14.987.400,00	0,00
	2.07.05.2.02.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah LKS Tripartit yang Dibina*	1 Lembaga	1.262.297.920,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Lembaga	1.291.085.920,00	28.788.000,00
	2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	*Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja*	100 Orang	52.375.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	100 Orang	30.978.000,00	(21.397.000,00)
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**			42.249.630,00			34.741.630,00	(7.508.000,00)
	3.32	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**			42.249.630,00			34.741.630,00	(7.508.000,00)

1,	**3.32.03**	**PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	**Jumlah animo masyarakat bertransmigran pada tahun n**	**8 KK**	42.249.630,00		**8 KK**	34.741.630,00	(7.508.000,00)
	3.32.03.2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*JUmlah calon transmigran yang terdaftar, terseleksi adminitrasi dan tekhnisnya*	7 KK	42.249.630,00		7 KK	34.741.630,00	(7.508.000,00)
	3.32.03.2.01.0011	Pendaftaran, Seleksi Administrasi dan Seleksi Teknis Calon Transmigran Penduduk Asal	*Jumlah Calon Transmigran yang Terdaftar, Terseleksi Administrasi dan Teknisnya*	8 KK	29.999.780,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8 KK	88.127.180,00	58.127.400,00
		UPTD LATIHAN KERJA			**12.928.525.480,00**			**14.170.979.970,00**	**1.242.454.490,00**
	2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**			**12.928.525.480,00**			**14.170.979.970,00**	**1.242.454.490,00**
1,	**2.07.03**	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**Jumlah Lembaga Pelathian Kerja (LPK) yang terakreditasi Persentase lulusan Pelatihan yang kompeten**	**35 Lembaga 75 Persen**	**12.928.525.480,00**		**35 Lembaga 75 Persen**	**14.170.979.970,00**	**1.242.454.490,00**
	2.07.03.2.01	**Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi**	***Jumlah pencari kerja yang memiliki kompetensi***	**2000 Orang**	**12.928.525.480,00**		**1744 Orang**	**14.170.979.970,00**	**1.242.454.490,00**
	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	*Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n*	2000 Orang	8.874.349.380,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1744 Orang	7.528.171.780,00	(1.346.177.600,00)

	2.07.03.2.01.0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	*Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja*	100 Unit	4.054.176.100,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	100 Unit	6.642.808.190,00	2.588.632.090,00
	J U M L A H				**39.668.666.822,00**			**40.586.537.377,00**	**917.870.555,00**

BAB IV
PENUTUP

Dengan disusunnya Rencana Kerja Perubahan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang tahun 2025, maka seluruh program kegiatan disusun dan diatur untuk mencapai sasaran keberhasilan dibidang ketenagakerjaan, secara sinergik serta selaras dengan hasil perumusan Perencanaan Strategik (RENSTRA) dan RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2025 dapat berhasil dengan baik, apabila terdapat komitmen melalui proses komunikasi baik secara top down maupun botom-up opproach.

Melalui visi dan misi serta pemahaman faktor–faktor kunci keberhasilan dan responsif terhadap setiap kondisi lingkungan baik internal maupun eksternal, maka Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang akan mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik dan benar.

Proses pemantauan dan penilaian kemajuan serta keberhasilan terhadap implementasi dari Rencana Kerja Perubahan ini sebagai persyaratan mutlak yang harus dilakukan oleh seluruh aparatur pelaksana Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang, adpun aspek-aspek yang harus mendapat perhatian dalam mengevaluasi Rencana Kerja ini adalah bahwa :

1. Proses evaluasi dilaksanakan secara berjenjang dan berkelanjutan sesuai dengan proses pelaksanaan kegiatan;
2. Adanya komunikasi secara aktif dari para pelaksana kegiatan (botom-up approach), melalui laporan tertulis secara berjenjang sebagai bukti adanya komitmen dari masing masing lini sesuai proses pelaksanaan kegiatan;
3. Agar Rencana Kerja perubahan ini dapat diimplementasikan oleh seluruh aparatur Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang secara efektif dan efisien, maka perlu diperhatikan hal hal sebagai berikut :
   - Rencana Kerja yang telah dirumuskan bersama ini harus mampu memperoleh manfaat yang sebesar besarnya bagi masyarakat dari berbagai peluang yang tercipta didalam pelaksanaan program tersebut, serta harus mampu memperkecil bahkan menghilangkan dampak dari faktor yang bersifat negatif.
   - Rencana Kerja Perubahan ini disusun dan dirumuskan untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik baiknya, sebesar-besarnya demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat serta terwujudnya pemerintahan yang baik (good governance).

Demikian Rencana Kerja Perubahan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang Tahun 2025 ini disusun dengan harapan dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan serta dapat bermanfaat didalam pelaksanaan pembangunan ketenagakerjaan.

Kami menyadari dokumen perencanaan ini masih banyak kekurangan kekurangannya, untuk itu kami sangat mengharapkan kritik serta sarannya untuk bahan perbaikan perencanaan kedepan dan atas segala perhatiannya diucapkan terima kasih.

18. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tangerang sebagai unsur pelaksana urusan yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menjadi kewenangan daerah dan tugas bantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah.

Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tangerang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Tangerang Nomor 23 tahun 2023 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Tangerang.

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 membahas evaluasi capaian kinerja periode Triwulan I tahun berjalan (Tahun 2025), dan rencana target kinerja selama tahun berjalan (Tahun 2025), agar dalam pencapaiannya sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan pada Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tangerang tahun 2024-2026.

1.2Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan hokum dalam menyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025 disusun dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44375587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubaha Kedua atas
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-undangNomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140);
8. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak;
9. Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak diubah dengan nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak;
10. Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumahtangga (KDRT);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan;
13. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
14. Peraturan presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
15. Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional; Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
16. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan;
17. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Nomor 11 tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota layak anak;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tatacara Perencanaan, Pengendaliaan, dan Evaluasi Pembagunan daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tantang Rencanan Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, Dan RKPD;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2024 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Infentarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kode Vikasi dan Nomen Klatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Intruksi Mentri Dalam Negri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Tahun 2023 Dan Daerah Otonom Baru;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;
23. Peraturan Daerah Nomor 17 ahun 2018 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak;
24. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 117 tahun 2015 tentang pengarusutamaan hak anak dalam pengembangan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Tangerang;
25. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 119 tahun 2015 tentang petunjuk teknis penyusunaan perencanaan dan penganggaran responsive gender;
26. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 39 Tahun 2023 Tentang

Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2024 – 2026;

27. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 20 tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tangerang tahun 2025 adalah sebagai dokumen acuan dalam pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk satu tahun (2025) secara terencana, terarah, terpadu dan berkesinambungan sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Kabupaten Tangerang tahun 2024 – 2026. Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Perubahan tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Evaluasi capaian kinerja Triwulan I Tahun 2025;
2. Target kinerja yang akan dicapai pada tahun berjalan (tahun 2025).

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

2.1 Evaluasi Renja Perangkat Daerah Triwulan I Tahun 2025
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Rencana Kerja
3.2 Pendanaan

BAB IV : PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan I Tahun 2025

Penyusunan laporan evaluasi kinerja merupakan upaya kami untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tangerang selama Triwulan I Tahun 2025, sebagai konsistensi kami terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi yang merupakan pilar terwujudnya Tata Pemerintahan yang baik. Evaluasi Kinerja Triwulan I Tahun 2025 memuat informasi tentang Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pencapaian Sasaran yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tangerang Tahun 2025.

Hasil pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tangerang tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak yakni Masyarakat, Swasta dan Aparat Pemerintah Daerah baik dalam perumusan kebijakan, maupun dalam implementasi serta pengawasannya. Hasil Evaluasi Kinerja Triwulan I Tahun 2025 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tangerang dapat digambarkan pada tabel berikut:

Tabel II.1
Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Capaian (%)	Realisasi Fisik Kegiatan (%)	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Satuan	Target indikator	Realisasi Indikator	Capaian (%)
1	2	3	4	5=(4/3)*100	6	7	8	9	10	11=(10/9)*100
2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**									
2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.496.861.444	3.408.039.096	27.27 %	94.05 %	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	%	25	25	100.00 %
2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	172.799.564	22.464.940	13.00 %	100.00 %	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	-	-	0.00 %
2.08.01.2.01.0001	*Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	107.638.724	13.059.940	12.13 %	100.00 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1	1	100.00 %
2.08.01.2.01.0006	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	43.690.790	4.088.000	9.36 %	100.00 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	1	100.00 %
2.08.01.2.01.0007	*Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	21.470.050	5.317.000	24.76 %	100.00 %	JUmlah Laporan Evaluasi KInerja Perangkat Daerah	Laporan	1	1	100.00 %
2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.790.296.574	2.356.341.948	24.07 %	98.00 %	Jumlah laporan keuangan	Dokumen	-	-	0.00 %
2.08.01.2.02.0001	*Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	9.761.242.790	2.347.244.948	24.05 %	96.00 %	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	33	32	96.97 %
2.08.01.2.02.0007	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD*	29.053.784	9.097.000	31.31 %	100.00 %	JUmlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD dan Laporan Koordinasi Penyususn Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD	Laporan	-	-	0.00 %
2.08.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	21.283.580	6.431.000	30.22 %	100.00 %	Jumlah laporan Barang Milik Daerah	Dokumen	-	-	0.00 %
2.08.01.2.03.0004	*Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD*	21.283.580	6.431.000	30.22 %	100.00 %	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pengawasan, dan Pengendalian Barang MIlik daerah Pada SKPD	Laporan	1	1	100.00 %
2.08.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	373.836.740	86.185.000	23.05 %	100.00 %	Jumlah Pegawai yang Difasilitasi	Orang	-	-	0.00 %
2.08.01.2.05.0002	*Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya*	321.357.000	86.185.000	26.82 %	100.00 %	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Paket	50	50	100.00 %
2.08.01.2.05.0009	*Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi*	52.479.740	0	0.00 %	0.00 %	Jumlah Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi	Orang	-	-	0.00 %
2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.476.280.910	660.125.469	44.72 %	92.86 %	Tersedia administrasi umum perangkat daerah	Jenis	3	3	100.00 %
2.08.01.2.06.0001	*Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*	23.290.000	23.025.000	98.86 %	100.00 %	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	15	15	100.00 %
2.08.01.2.06.0002	*Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	620.242.000	433.479.000	69.89 %	100.00 %	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	10	10	100.00 %
2.08.01.2.06.0004	*Penyediaan Bahan Logistik Kantor*	494.935.500	133.871.000	27.05 %	100.00 %	Jumlah paket barang logistik kantor kantor yang disediakan	Paket	8	8	100.00 %
2.08.01.2.06.0005	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	24.637.410	13.930.000	56.54 %	100.00 %	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	1	100.00 %

2.08.01.2.06.0006	*Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan*	8.000.000	1.120.000	14.00 %	50.00 %	Jumlah dokumen bahan bacaan dan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	1	1	100.00 %
2.08.01.2.06.0008	*Fasilitasi Kunjungan Tamu*	129.600.000	12.450.000	9.61 %	100.00 %	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	1	100.00 %
2.08.01.2.06.0009	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	175.576.000	42.250.469	24.06 %	100.00 %	Jumlah Laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan	1	1	100.00 %
2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	155.400.000	37.561.500	24.17 %	100.00 %	Tersedianya Jasa Penunjang	Jenis	1	1	100.00 %
2.08.01.2.08.0001	*Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	15.000.000	4.950.000	33.00 %	100.00 %	Jumlah laporan penyediaan jasa surat-menyurat	Laporan	1	1	100.00 %
2.08.01.2.08.0002	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	20.400.000	4.111.500	20.15 %	100.00 %	Jumlah Laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik	Laporan	3	3	100.00 %
2.08.01.2.08.0003	*Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	120.000.000	28.500.000	23.75 %	100.00 %	Jumlah Laporan penyediaan jasa perawatan peralatan dan perlengkapan kantor	Laporan	1	1	100.00 %
2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	506.964.076	238.929.239	47.13 %	78.33 %	tersedia pemeliharaan barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis	1	1	100.00 %
2.08.01.2.09.0001	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan*	272.814.076	56.869.239	20.85 %	85.00 %	Jumlah kendaraan dinas perorangan atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	2	2	100.00 %
2.08.01.2.09.0006	*Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	57.300.000	6.300.000	10.99 %	50.00 %	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	Unit	10	10	100.00 %
2.08.01.2.09.0009	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*	176.850.000	175.760.000	99.38 %	100.00 %	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	1	100.00 %
2.08.02	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	1.591.763.360	169.271.630	10.63 %	100.00 %	Persentase Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender	%	25	25	100.00 %
2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	82.605.860	0	0.00 %	0.00 %	Jumlah Opd yang memahami PPRG	Dokumen	-	-	0.00 %
2.08.02.2.01.0004	*Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG*	82.605.860	0	0.00 %	0.00 %	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah	63	63	100.00 %
2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	623.316.430	48.970.000	7.86 %	100.00 %	Jumlah Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dalam Pemberdayaan Perempuan	Orang	150	150	100.00 %
2.08.02.2.02.0001	*Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi*	159.991.000	5.950.000	3.72 %	100.00 %	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Bidang Politik, Hukum, Sosial Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	-	-	0.00 %
2.08.02.2.02.0002	*Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi*	463.325.430	43.020.000	9.29 %	100.00 %	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kelompok	5	5	100.00 %
2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	885.841.070	120.301.630	13.58 %	100.00 %	Jumlah Perempuan Yang Mengikuti Peningkatan keterampilan, dan Kesejahteraan	Orang	436	436	100.00 %
2.08.02.2.03.0002	*Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota*	629.583.600	87.887.950	13.96 %	100.00 %	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Orang	250	250	100.00 %
2.08.02.2.03.0003	*Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota*	256.257.470	32.413.680	12.65 %	100.00 %	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Informasi dan	Dokumen	1	1	100.00 %

						Edukasi (KIE) Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota				
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	747.714.990	123.900.000	16.57 %	100.00 %	Persentase Perlindungan Terhadap Perempuan	%	25	25	100.00 %
2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	285.733.350	79.000.000	27.65 %	100.00 %	Meningkatnya pencegahan kekerasan terhadap Perempuan	Kelompok	10	10	100.00 %
2.08.03.2.01.0001	*Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota*	285.733.350	79.000.000	27.65 %	100.00 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	-	-	0.00 %
2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	193.461.740	0	0.00 %	0.00 %	Terlayaninya korban kekerasan terhadap perempuan sesuai standar	%	25	25	100.00 %
2.08.03.2.02.0002	*Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota*	193.461.740	0	0.00 %	0.00 %	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah	25	25	100.00 %
2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	268.519.900	44.900.000	16.72 %	100.00 %	Tersedianya tenaga pelayanan Kekerasatn Terhadap Perempuan yang terlatih	Orang	35	35	100.00 %
2.08.03.2.03.0004	*Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota*	268.519.900	44.900.000	16.72 %	100.00 %	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	-	-	0.00 %
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	613.265.120	53.817.000	8.78 %	100.00 %	Persentase Peningkatan Kualitas Hidup Keluarga	%	25	25	100.00 %
2.08.04.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	613.265.120	53.817.000	8.78 %	100.00 %	Persentasi Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota melalui PUSPAGA, PERCANTIK dan Sosialisasi Keluarga Layak Ana	Orang	30	30	100.00 %
2.08.04.2.02.0002	*Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*	547.163.370	53.817.000	9.84 %	100.00 %	JumlahsumberdayaLembagaPenyedia LayananPeningkatanKualitasKeluarga yang mendapat PeningkatanKapasitas KeluargaKewenangan Kabupaten/Kota	Orang	100	100	100.00 %
2.08.04.2.02.0003	*Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*	66.101.750	0	0.00 %	0.00 %	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	-	-	0.00 %
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	46.839.800	0	0.00 %	0.00 %	Persentase Profil Gender dan Penyususnan Pedoman Pengumpulan Data Terpilah	%	25	25	100.00 %
2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	46.839.800	0	0.00 %	0.00 %	Tersedianya data informasi gender dan anak serta profil gender	Dokumen	-	-	0.00 %
2.08.05.2.01.0001	*Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota*	46.839.800	0	0.00 %	0.00 %	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	Dokumen	-	-	0.00 %
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	905.067.200	91.610.000	10.12 %	100.00 %	Persentase Seluruh Klaster Hak Anak	%	25	25	100.00 %
2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	339.286.200	3.650.000	1.08 %	100.00 %	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi gugus tugas KLA	Persen	25	25	100.00 %
2.08.06.2.01.0002	*Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota*	339.286.200	3.650.000	1.08 %	100.00 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenagan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	100.00 %

2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	565.781.000	87.960.000	15.55 %	100.00 %	Terlaksananya KHA dalam pengembangan SRA, KELANA dan DEKELA	Orang	268	268	100.00 %
2.08.06.2.02.0002	*Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*	116.718.000	52.920.000	45.34 %	100.00 %	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	100.00 %
2.08.06.2.02.0003	*Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*	166.939.600	0	0.00 %	0.00 %	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Informasi dan Edukasi (KIE) Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	-	-	0.00 %
2.08.06.2.02.0004	*Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*	282.123.400	35.040.000	12.42 %	100.00 %	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	-	-	0.00 %
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	694.572.700	134.075.000	19.30 %	100.00 %	Persentase Perlindungan terhadap Anak	%	25	25	100.00 %
2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	259.251.800	66.500.000	25.65 %	100.00 %	Meningkatnya pencegahan kekerasan terhadap anak	Persen	16	16	100.00 %
2.08.07.2.01.0001	*Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota*	259.251.800	66.500.000	25.65 %	100.00 %	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah	30	30	100.00 %
2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	193.389.150	0	0.00 %	0.00 %	Terlayaninya korban kekerasan terhadap anak sesuai standar	%	25	25	100.00 %
2.08.07.2.02.0005	*Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*	193.389.150	0	0.00 %	0.00 %	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	Orang	25	25	100.00 %
2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	241.931.750	67.575.000	27.93 %	100.00 %	Tersedianya tenaga pelayanan Kekerasatn Terhadap Anak yang terlatih	Orang	61	61	100.00 %
2.08.07.2.03.0005	*Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota*	241.931.750	67.575.000	27.93 %	100.00 %	JumlahLaporanHasilKoordinasidan SinkronisasiPenyediaanSaranaPrasara na Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	-	-	0.00 %

TABEL II.2
REALISASI ANGGARAN BERDASARKAN BELANJA TRIWULAN I TAHUN 2025

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSEN (%)
A	**PENDAPATAN**	-	-	-
B	**BELANJA**	**17.096.084.614,00**	**4.109.312.726,00**	**24,04**
1	Belanja Operasi	16.475.842.614,00	3.675.833.726,00	22,31
a	Belanja Pegawai	9.761.242.790,00	2.347.244.948,00	24,05
b	Belanja Barang dan Jasa	6.714.599.824,00	1.328.588.778,00	19,79
2	Belanja Modal	620.242.000,00	433.479.000,00	69,89
a	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	620.242.000,00	433.479.000,00	69,89

TABEL III.3
REALISASI ANGGARAN PER PROGRAM
TRIWULAN I TAHUN 2025

NO	PROGRAM	JUMLAH KEG	JUMLAH SUB KEG	PAGU ANGGARAN	REALISASI	PERSEN (%)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7	21	12.496.861.444,00	3.415.459.096,00	27,33
2	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	3	5	1.591.763.360,00	205.445.630,00	12,91
3	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	3	3	747.714.990,00	169.910.000,00	22,72
4	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	1	2	613.265.120,00	53.817.000,00	8,78
5	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	1	1	46.839.800,00	0,00	0,00
6	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	2	4	905.067.200,00	91.610.000,00	10,12
7	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	3	3	694.572.700,00	173.071.000,00	24,92

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tangerang tahun 2024-2026, terdapat 3 IKK yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yaitu :

TABEL II.2
ANALISIS KINERJA PERANGKAT DAERAH

NO	INDIKATOR	SPM/STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH			REALISASI CAPAIAN	PROYEKSI			CATATAN ANALISIS
				2024	2025	2026	2024	2024	2024	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Persentase Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender	-	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	51.81	51.82	51.83	51.81	51.81	51.82	51.83	
	Persentase Perlindungan Terhadap Anak	-	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
	Persentase Perlindungan Terhadap Perempuan	-	Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	9.38%	9.26%	9.14%	5.86%	5.86%	5.5%	5%	

2.2.1 Persentase Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender

PUG atau Pengarustamaan Gender adalah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai **kesetaraan dan keadilan** gender dalam aspek kehidupan manusia melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki untuk memberdayakan perempuan dan laki-laki mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dari seluruh kebijakan, program, kegiatan di berbagai bidang kehidupan pembangunan nasional dan daerah. Indonesia telah memiliki komitmen kuat dalam mengupayakan terwujudnya kesetaraan dan pengarusutamaan gender. Berikut ini adalah kendala yang dihadapi dalam penguatan kelembagaan pengarustamaan gender :

1. Kurangnya pemahaman aparatur tentang strategi pengarustamaan gender
2. Masih terbatasnya SDM dalam melaksanakan PPRG
3. Kurangnya kompetensi untuk melakukan analisis gender
4. Belum maksimalnya peran Driver PUG

2.2.2 Persentase Perlindungan Terhadap Anak

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak mencakup pemberian jaminan secara menyeluruh terhadap hak-hak mereka dan upaya untuk melindungi mereka dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan ini diberikan melalui kerangka hukum positif atau UU yang mengatur hak dan kesejahteraan anak- anak. Tujuan utama dari perlindungan anak adalah memastikan bahwa anak-anak dapat tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi dalam masyarakat sesuai dengan martabat dan hak asasi manusia. Berikut ini adalah Kekuatan, Kelemahan dan Hambatan yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tangerang terkait perlindungan anak :

1. Kekuatan
    A. Sudah terjalinnya Koordinasi antar lintas sektoral terkait perlindungan kekerasan terhadap anak
    B. Aplikasi Sistem Informasi Sayang Barudak sebagai Inovasi dalam era digital atau era 4.0
    C. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak guna memudahkan dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak
2. Kelemahan
    A. Kurangnya koordinasi internal antar bidang
    B. Advokasi yang belum menyentuh seluruh sasaran dari anak

C. Belum tersedianya rumah perlindungan sementara (rumah aman) bagi korban kekerasan terhadap anak

3. Tantangan

A. Masih banyaknya kekerasan terhadap anak

B. Belum optimalnya pemanfaatan aplikasi SISABAR

C. Belum efektifnya peran satuan-satuan tugas di bidang perlindungan perempuan dan anak

2.2.3 Persentase Perlindungan Terhadap Perempuan

Perlindungan perempuan adalah segala upaya yang ditujukan untuk melindungi perempuan dan memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-haknya dengan memberikan perhatian yang konsisten dan sistematis yang ditujukan untuk mencapai kesetaraan gender. Berikut ini adalah Kekuatan, Kelemahan dan Hambatan yang yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tangerang terkait perlindungan perempuan :

1. Kekuatan

A. Sudah terjalinnya Koordinasi antar lintas sektoral terkait perlindungan kekerasan terhadap perempuan

B. Aplikasi Sistem Informasi Sayang Barudak sebagai Inovasi dalam era digital atau era 4.0

C. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak guna memudahkan dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan

2. Kelemahan

A. Kurangnya koordinasi internal antar bidang

B. Advokasi yang belum menyentuh seluruh sasaran dari perempuan

C. Belum tersedianya rumah perlindungan sementara (rumah aman) bagi korban kekerasan terhadap perempuan

3. Tantangan

A. Masih banyaknya kekerasan terhadap perempuan

B. Belum optimalnya pemanfaatan aplikasi SISABAR

C. Belum efektifnya peran satuan-satuan tugas di bidang perlindunganperempuan

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.3.1 Tingkat Pelayanan Kinerja DPPPA Kabupaten Tangerang

Berdasarkan Keputusan Bupati Tangerang Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kabupaten Tangerang, terdiri atas :

1. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

   Dinas mempunyai tugas membantu Bupati merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina serta mengendalikan pelaksanaan Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah.

   A. Kepala Dinas

      Kepala Dinas mempunyai uraian tugas :

      1) merumuskan program kerja Dinas;
      2) mengoordinasikan pelaksanaan program kerja Dinas;
      3) membina kinerja aparatur di lingkungan Dinas;
      4) mengarahkan pelaksanaan program kerja Dinas mengacu kepada rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
      5) menyelenggarakan program kerja Dinas;
      6) mengevaluasi hasil pelaksanaan program kerja Dinas;
      7) melaporkan pelaksanaan program kerja Dinas; dan
      8) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

2. Sekretariat

   Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas

   A. Sekretaris Dinas mempunyai uraian tugas :

      1) merencanakan perumusan kebijakan yang berkaitan dengan umum dan kepegawaian, keuangan, serta perencanaan;
      2) membagi tugas program yang berkaitan dengan umum dan kepegawaian, keuangan, serta perencanaan;
      3) memberi petunjuk program yang berkaitan dengan umum dan kepegawaian, keuangan, serta perencanaan;
      4) mengatur program yang berkaitan dengan umum dan kepegawaian, keuangan, serta perencanaan;
      5) mengendalikan mutu bahan rencana pembangunan jangka menengah Daerah dan rencana strategis dalam bidang kepegawaian Daerah sebagai bahan penyusun rencana pembangunan jangka menengah Daerah dan rencana strategis Daerah;
      6) mengendalikan mutu rencana kerja dan anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran Dinas;
      7) mengendalikan mutu dan mengolah bahan evaluasi

program dan kegiatan Dinas;

8) mereviu dan mengendalikan mutu laporan kinerja instansi pemerintah;

9) mengatur pemenuhan program aplikasi system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah secara elektronik;

10) merumuskan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat Daerah;

11) mengatur administrasi barang miiik Daerah pada Perangkat Daerah;

12) mengatur administrasi kepegawaian perangkat Daerah;

13) mengatur administrasi umum perangkat Daerah; dan

14) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

B. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas:

1) merencanakan kegiatan umum dan kepegawaian, organisasi, dan tata laksana Dinas;

2) membimbing pelaksanaan kegiatan umum dan kepegawaian;

3) membagi tugas pelaksanaan kegiatan umum dan Kepegawaian;

4) melaksanakan perencanaan kebutuhan, pengamanan, koordinasi dan penilaian, pembinaan, pengawasan pengendalian, rekonsiliasi dan penyusunan laporan, penatausahaan dan pemanfaatan barang milik Daerah;

5) melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan system informasi kepegawaian;

6) melaksanakan monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai;

7) memfasiiitasi pemulangan pegawai yang pensiun serta yang meninggal dalam melaksanakan tugas;

8) memfasilitasi pemindahan tugas ASN;

9) memfasilitasi pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi;

10) memfasilitasi penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor, peralatan rumah tangga, bahan logistik kantor, barang cetakan dan penggandaan, bahan bacaan dan peraturan perundangundangan, serta bahan/material;

11) melaksanakan penatausahaan arsip dinamis;

12) melaksanakan dukungan pelaksanaan system pemerintahan berbasis elektronik;

13) melaksanakan penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi dan zona integritas;

14) melaksanakan administrasi/ penatausahaan, penggandaan, pengiriman, pendistribusian surat, tata naskah dinas, arsip dinamis Dinas, jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, penyedian jasa peralatan dan perlengkapan kantor, serta jasa pelayanan umum kantor;

15) melaksanakan pengadaan penyusunan rencana kebutuhan barang milik Daerah, administrasi/ penatausahaan barang milik Daerah, serta penyusunan laporan barang milik Daerah;

16) memfasilitasi peralatan dan perlengkapan kantor, rumah tangga, sarana dan prasarana kantor, perjalanan dinas, serta kendaraan operasional/ Dinas;

17) memfasilitasi pengadaan mebel, peralatan dan mesin, pengadaan aset tetap lainnya, pengadaan aset tetap tak berwujud, pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya, serta pengadaan sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya;

18) memfasilitasi penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi Dinas serta kunjungan tamu;

19) memfasilitasi pengelolaan informasi dan dokumen;

20) melaksanakan penyusunan bahan untuk peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai;

21) menyusun kebutuhan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya;

22) mempersiapkan koordinasi pelaksanaan analisa jabatan, analisa beban kerja, serta kebutuhan pegawai;

23) menghimpun dan mengolah data administrasi kepegawaian;

24) melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan serta mengadakan bimbingan teknis implementasinya;

25) membuat laporan pelaksanaan kegiatan umum dan kepegawaian; dan

26) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

3. Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga

Bidang peningkatan kualitas hidup perempuan dan keluarga mempunyai tugas merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, pembinaan dan pengendalian bidang peningkatan kualitas hidup perempuan dan keluarga.

A. Kepala Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga mempunyai uraian tugas :

1) merencanakan operasional program peningkatan kualitas hidup perempuan dan keluarga;

2) membagi tugas program peningkatan kualitas hidup perempuan dan keluarga;

3) memberi petunjuk program peningkatan kualitas hidup perempuan dan keluarga;
4) mengatur program peningkatan kualitas hidup perempuan dan keluarga;
5) merencanakan kegiatan peningkatan kualitas hidup perempuan dan keluarga;
6) mengevaluasi kegiatan program peningkatan kuaiitas hidup perempuan dan keluarga;
7) melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan pelaksanaan pengarustamaan gender;
8) melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pengarustamaan gender kewenangan kabupaten;
9) melaksanakan advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan pengarusutamaan, perencanaan, dan penganggaran responsif gender;
10) melaksanakan sosialisasi kebiiakan pelaksanaan pengarusutamaan, perencanaan, dan penganggaran responsif gender;
11) melaksanakan sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi;
12) melaksanakan advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dan politik, hukum, sosial, dan ekonomi;
13) melaksanakan advokasi kebijakan dan pendampingan kepada lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten;
14) meningkatkan kapasitas sumber daya Lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten;
15) mengembangkan komunikasi, informasi dan edukasi pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten;
16) melaksanakan advokasi kebijakan dan pendampingan untuk mewujudkan kesetaraan gender dan perlindungan anak kewenangan kabupaten;
17) melaksanakan komunikasi, informasi dan edukasi kesetaraan gender, serta perlindungan anak bagi keluarga kewenangan kabupaten;
18) mengembangkan kegiatan masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga kewenangan kabupaten;
19) melaksanakan advokasi kebijakan dan pendampingan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga tingkat Daerah;
20) meningkatkan kapasitas sumber daya Lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga tingkat Daerah;
21) melaksanakan penguatan jejaring antarlembaga penyedia

layanan peningkatan kualitas keluarga tingkat Daerah;

22) melaksanakan penyediaan layanan komprehensif bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan perlindungan anak yang wilayah kerjanya Dalam Daerah; dan

23) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

4. Bidang Pengelolaan Data Gender dan Pemenuhan Hak Anak

Bidang pengelolaan data gender dan pemenuhan hak anak dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Pengelolaan Data Gender dan Pemenuhan Hak Anak yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

A. Kepala Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga mempunyai uraian tugas :

1) merencanakan perumusan kebijakan program bidang pengelolaan data gender dan pemenuhan hak anak;

2) membagi tugas program bidang pengelolaan data gender dan pemenuhan hak anak;

3) memberi petunjuk program bidang pengelolaan data gender dan pemenuhan hak anak;

4) mengatur program bidang pengelolaan data gender dan pemenuhan hak anak;

5) merencanakan kegiatan pengelolaan data gender dan pemenuhan hak anak;

6) mengevaluasi kegiatan program pengelolaan data gender dan pemenuhan hak anak;

7) penyediaan data gender dan anak di kewenangan kabupaten;

8) penyajian dan pemanfaatan data gender dan anak dalam kelembagaan data di kewenangan kabupaten;

9) melaksanakan advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada Lembaga pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha kewenangan kabupaten;

10) melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi memfasilitasi layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten;

11) melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak tingkat Daerah;

12) mengembangkan komunikasi, informasi dan edukasi pemenuhan hak anak bagi Lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat Daerah;

13) melaksanakan penguatan jejaring antar Lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat

daerah; dan

14) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

5. Bidang Perlindungan Perempuan dan Hak Khusus Anak

Bidang perlindungan hak perempuan dan khusus anak dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Khusus Anak yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas

A. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Hak Khusus Anak mempunyai uraian tugas :

1) merencanakan perumusan kebijakan program bidang perlindungan hak perempuan dan khusus anak;
2) membagi tugas program bidang perlindungan hak perempuan dan khusus anak;
3) memberi petunjuk program bidang perlindungan hak perempuan dan khusus anak;
4) mengatur program bidang perlindungan hak perempuan dan khusus anak;
5) merencanakan kegiatan bidang perlindungan hak perempuan dan khusus anak;
6) mengevaluasi kegiatan program bidang perlindungan hak perempuan dan khusus anak;
7) melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup Daerah;
8) melaksanakan advokasi kebijakan dan pendampingan layanan perlindungan perempuan kewenangan kabupaten;
9) memfasilitasi penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten;
10) melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten;
11) melaksanakan advokasi kebijakan dan pendampingan penyediaan sarana prasarana layanan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten;
12) meningkatkan kapasitas sumber daya Lembaga penyedia iayanan penanganan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten;
13) memfasilitasi penyediaan kebutuhan spesifik bagi perempuan dalam situasi darurat dan kondisi khusus kewenangan kabupaten;
14) melaksanakan penguatan jejaring antar Lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan kewenangan kabupaten;
15) melaksanakan advokasi kebijakan dan pendampingan

pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten;

16) melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten;

17) memfasilitasi penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat Daerah;

18) melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kabupaten;

19) mengembangkan komunikasi, informasi dan edukasi anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kabupaten ;

20) melaksanakan penguatan jejaring antar Lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kabupaten;

21) melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penyediaan sarana prasarana layanan bagi anak yang memerlukan perllndungan khusus tingkat Daerah;

22) melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi peningkatan kapasitas sumber daya Lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat Daerah;

23) melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat Daerah; dan

24) melaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

2.3.2 Permasalahan dan Hambatan Yang Dihadapi Dalam Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi

Dalam rangka menyelesaikan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah diantaranya dengan melakukan identifikasi permasalah dan hambatan yang harus ditangani dalam rangka meningkatkan penyelenggaran pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Permasalahan dan hambatan yang dimaksud sebagai berikut :

1. Masih banyaknya kekerasan terhadap perempuan dan anak
2. Kurang optimalnya pemanfaatan aplikasi SISABAR
3. Belum semua OPD mengerti tentang PUG
4. Kurang optimalnya Penguatan kelembagaan PUG
5. Masih kurangnya kesadaran gugus tugas Kabupaten Layak Anak terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi pada pemenuhan hak anak.
6. Masih kurangnya partisipasi anak dalam keberlangsungan Perencanaan dan pembangunan daerah

7. Ketersediaan sumber daya manusia secara kualitas dan kuantitas yang berkompeten belum maksimal
8. Pelaksanaan bimbingan teknis belum dilaksanakan secara massif
9. Pemetaan proses bisnis OPD belum optimal
10. Belum optimalnya koordinasi baik secara internal OPD maupun eksternal dengan OPD teknis yang terkait.

2.3.3 Dampak Program dan Kegiatan Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Rencana Pembangunan Daerah

Berpedoman pada Visi dan Misi Kabupaten Tangerang, Visi merupakan suatu rumusan tentang keadaan yang diinginkan dimasa depan dalam hal ini adalah keadaan Kabupaten Tangerang di awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang yaitu pada tahun 2025. Visi untuk Kabupaten Tangerang dirumuskan dengan memperhatikan berbagai hal mencakup tantangan dan peluang dimasa depan. Dengan mempertimbangkan kondisi objektif seluruh sumber daya dan komitmen untuk meraih masa depan yang lebih baik, maka ditetapkan sebagai berikut :

"Terwujudnya Kabupaten Tangerang Gemilang yang Maju, Sejahtera, Berdaya Saing dan Berkelanjutan"

Visi tersebut secara eksplisit dapat dijelaskan :

1. Gemilang. Kabupaten Tangerang Gemilang dengan slogan Satya Karya Kerta Raharja menggambarkan harapan yang ingin diraih oleh Kabupaten Tangerang dimasa depan yaitu mewujudkan kehidupan yang makmur, adil, dan sejahtera dengan memberdayakan potensi daerah yang dimiliki. Branding Kabupaten Tangerang disimbolkan dengan pohon mangrove yang melambangkan kekokohan, perbedaan, dan kolaborasi, serta memiliki kekuatan akar yang kokoh untuk mampu bertahan. Selain itu, branding Kabupaten Tangerang Gemilang disimbolkan dengan seekor ayam wareng bernama "Gilang" yang berarti cahaya terang, digunakan untuk memperkenalkan kebudayaan Kabupaten Tangerang ke daerah-daerah lain. Kabupaten Tangerang berupaya untuk mewujudkan kabupaten sebagai pusat kegiatan industri, kawasan permukiman yang terintegrasi, dan pengembangan perkotaan baru yang didukung dengan pertanian yang berkelanjutan.
2. Maju. Kabupaten Tangerang pada tahun 2045 menjadi salah satu kabupaten yang maju tidak hanya dalam ilmu pengetahun dan teknologi, namum juga dalam berbudaya dan peradaban, sehingga menciptakan kualitas sumber daya manusia yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing. Kabupaten Tangerang yang maju juga berarti memiliki pertumbuhan ekonomi tinggi didukung tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang andal, serta infrastruktur yang inklusif dan berkelanjutan.
3. Sejahtera. Seluruh masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dasar meliputi sandang, papan, dan pangan; fasilitas pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial; serta memiliki pendapatan yang mencukupi secara berkeadilan.

4. Berdaya Saing. Terwujudnya Kabupaten Tangerang yang unggul, senantiasa berinovasi, dan menjunjung tinggi nilai-nilai daerah yang diperlihatkan oleh kualitas sumber daya manusia yang adaptif terhadap IPTEK, kelembagaan pemerintahan yang akuntabel, dan perekonomian yang maju.
5. Berkelanjutan. Kata “berkelanjutan” dimaknai sebagai prinsip pembangunan berkelanjutan, dimana pembangunan dilaksanakan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; ketangguhan masyarakat dan infrastruktur terhadap kebencanaan dan krisis iklim; keadilan dan kesetaraan; serta ketangguhan ekonomi berlandaskan ekonomi lestari.

Misi adalah pernyataan tentang upaya yang harus dilakukan dalam usaha mewujudkan Visi. Misi juga akan memberikan arah sekaligus Batasan proses pencapaian tujuan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan Visi Kabupaten Tangerang tahun 2005-2025 tersebut akan ditempuh melalui misi pembangunan daerah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Unggul yang Berkualitas dan Berdaya SaingTinggi;
2. Mewujudkan Perekonomian yang Kokoh melalui Pembangunan dan Pemerataan Ekonomi yang Berkeadilan Berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan Efisien;
4. Mewujudkan Keamanan dan Perekonomian Daerah yang Stabil;
5. Mewujudkan Kelembagaan Masyarakat yang Tangguh untuk Mendukung Keberlanjutan Lingkungan Hidup;
6. Mewujudkan Keterpaduan Penataan Ruang untuk Pembangunan Wilayah yang Merata dan Berkeadilan;
7. Mewujudkan Pemenuhan Kapasitas dan Layanan Sarana Prasarana secara Menyeluruh; dan
8. Mewujudkan Pembangunan yang Berkesinambungan Didukung Kolaborasi dan Manajemen Berbasis Risiko.

2.3.4 Tantangan dan Peluang Dalam Meningkatkan Pelayanan DPPPA Kabupaten Tangerang

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tangerang dalam menjalan tugas pokok dan fungsinya dihadapkan pada tantangan dan peluang untuk meningkatkan peran dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak, pemberdayaan perempuan dan pemenuhan hak anak.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tangerang menghadapi beberapa tantangan antara lain :

1. Masih banyaknya kekerasan terhadap perempuan dan anak
2. Belum optimalnya pemanfaatan aplikasi SISABAR
3. Belum efektifnya peran satuan-satuan tugas di bidang perlindungan perempuan dana anak
4. Peningkatan sarana dan prasarana dalam pelayanan terhadap masyarakat
5. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia untuk peningkatan kualitas pelayanan

Selain tantangan yang harus dihadapi, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tangerang memiliki

peluang yang harus dimanfaatkan dan didayagunakan sehingga mampu mengatasi tantangan yang ada, beberapa peluang yang dimiliki antara lain :

1. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana yang didukung oleh alokasi anggaran yang memadai
2. Perkembangan teknologi informasi sebagai sarana untuk pelatihan dan bimbingan teknis bagi sumber daya manusia untuk meningkatkan kualitas pelayanan.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Rencana Kerja

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah pasal 27 ayat (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD ayat (2) Rancangan Renja SKPD disusun dengan mengacu kepada rancangan awal RKPD, Renstra SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Rencana Kerja Perubahan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tangerang tahun 2025 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tangerang tahun 2024-2026, yang meliputi tujuan dan sasaran perangkat daerah, indikator kinerja perangkat daerah, program prioritas beserta pendanaan program dan kegiatan.

Dari penjelasan diatas, maka rencana kerja untuk target capaian tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tangerang terdiri dari 4 (Empat) sasaran dan 4 (Empat) indikator sasaran pada tahun 2025 dapat dijabarkan pada tabel III.1 berikut ini :

TABEL III.1
TUJUAN DAN SASARAN DPPPA KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2024 DAN 2025

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN	DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	CAPAIAN	
						2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatkan Kesetaraan Gender		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dalam Bidang Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi, Hukum, dan Sosial Politik	Nilai	62.67	63.17
		Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dalam Pemberdayaan Perempuan	Persentase Peningkatan Keterlibatan Perempuan dalam Parlemen	Meningkatnya keterlibatan perempuan dalam parlemen	Persen	30	30
			Persentase peningkatan partisipasi perempuan dalam pemberdayaan di bidang ekonomi	Jumlah perempuan yang mendapatkan pelatihan dibagi jumlah kepala keluarga dikali 100	Persen	72.18	78.74
		Meningkatnya perlindungan permepuan dan anak	Persentase Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang tertangani secara Komperhensif	Jumlah kasus kekerasan terhadap permepuan dan anak yang tertangani sesuai standar pelayanan dibagi jumlah kasus terhadap perempuan dan anak di Laporkan	Persen	100	100
		Meningkatnya pemenuhan hak anak	Capaian Kategori Kabupaten Layak Anak	Pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan untuk menjamin terpenuhinya hak anak	Kategori	Nindya	Nindya
2	Meningkatkan Kinerja OPD	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP DPPPA	Persentase Perencanaan kinerja,pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, capaian kinerja	Nilai	77.00	79.00

Rencana Kerja untuk target capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tangerang yang terdiri dari :

TABEL III.2
TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA
DPPPA KABUPATEN TANGERANG

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	TAHUN		SUMBER DATA
				2024	2025	
1	Persentase peningkatan keterlibatan perempuan dalam Parlemen	Meningkatnya keterlibatan perempuan dalam parlemen	Persen	30	30	
2	Persentase peningkatan partisipasi perempuan dalam pemberdayaan	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dalam Bidang Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi, Hukum, dan Sosial Politik	Persen	72.18	78.74	
3	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang tertangani secara komperhensif	Jumlah kasus kekerasan terhadap permepuan dan anak yang tertangani sesuai standar pelayanan dibagi jumlah kasus terhadap perempuan dan anak di laporkan	Persen	100	100	
4	Capaian Kategori KLA	Pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan untuk menjamin terpenuhinya hak anak	Kategori	Nindya	Nindya	Kementrian PPPA
5	Nilai SAKIP DPPPA	Persentase Perencanaan kinerja,pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, capaian kinerja	Nilai	77.00	79.00	

4.2 Pendanaan

Penyelenggaraan Kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tangerang ditujukan untuk mewujudkan kesetaraan gender, meningkatkan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, hukum, dan politik, serta meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Untuk tahun

2025 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kabupaten Tangerang mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp **17.096.084.614,-**

Dalam APBD Perubahan Tahun 2025 terdapat penyesuaian anggaran menjadi Rp 17.990.887.919,- yang dialokasikan untuk:

1. Penyesuaian Belanja Pegawai **(** Belanja Gaji dan Tunjangan ASN) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tangerang sebesar Rp 244.815.412,-;
2. Penyediaan Rumah Aman bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan sebesar Rp 499.999.960,-
3. Peningkatan kapasitas Gabungan Organisasi Wanita (GOW) sebesar Rp 199.999.900,-
4. Penambahan pada kegiatan Dharma Wanita sebesar Rp 18.144.000,-
5. Penyesuaian Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS dan PPPK sebesar (Rp7.906.851,-)

TABEL III.3
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KAB. TANGERANG
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							**18.376.945.824,00**	**18.539.442.654,00**	**17.735.835.358,00**	**-641.110.466,00**							**18.688.945.824,00**
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**18.376.945.824,00**	**18.539.442.654,00**	**17.735.835.358,00**	**-641.110.466,00**							**18.688.945.824,00**
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**							**18.376.945.824,00**	**18.539.442.654,00**	**17.735.835.358,00**	**-641.110.466,00**							**18.688.945.824,00**
1,	**2.08.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan**				**100 Persen**	**100 Persen**	**11.977.212.874,00**	**12.691.081.974,00**	**12.436.612.288,00**	**121.732.950,00**							**12.098.945.824,00**
	2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				3 Dokumen	3 Dokumen	204.970.400,00	188.430.454,00	172.799.564,00	-32.170.836,00			-	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola	-		182.000.000,00

																Pemerintahan yang Baik			
	2.08.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	116.172.400,00	117.031.084,00	107.638.724,00	-8.533.676,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			84.000.000,00
	2.08.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	15.770.000,00	47.969.840,00	43.690.790,00	27.920.790,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			23.000.000,00
	2.08.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	

			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	73.028.000,00	23.429.530,00	21.470.050,00	-51.557.950,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			75.000.000,00
	2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah laporan keuangan*				2 Dokumen	2 Dokumen	9.909.603.444,00	9.793.291.574,00	9.730.047.418,00	-179.556.026,00			-	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	-		9.911.945.824,00
	2.08.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				33 Orang/bulan	33 Orang/bulan	9.879.603.444,00	9.761.242.790,00	9.688.993.634,00	-190.609.810,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			9.876.945.824,00
	2.08.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																	

			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00	32.048.784,00	41.053.784,00	11.053.784,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			35.000.000,00
	2.08.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah laporan Barang Milik Daerah*				1 Dokumen	1 Dokumen	24.999.530,00	25.711.870,00	21.283.580,00	-3.715.950,00			-	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	-		30.000.000,00
	2.08.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	24.999.530,00	25.711.870,00	21.283.580,00	-3.715.950,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			30.000.000,00

	2.08.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah pegawai yang difasilitasi*				50 Orang	50 Orang	119.864.600,00	388.698.500,00	373.836.740,00	253.972.140,00			-	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	-		130.000.000,00
	2.08.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				50 Paket	50 Paket	49.912.000,00	321.357.000,00	321.357.000,00	271.445.000,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			55.000.000,00
	2.08.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				50 Orang	50 Orang	69.952.600,00	67.341.500,00	52.479.740,00	-17.472.860,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			75.000.000,00

	2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah*				7 jenis	7 jenis	1.084.973.700,00	1.632.585.500,00	1.476.280.910,00	391.307.210,00			-	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	-		1.180.000.000,00
	2.08.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				15 Paket	15 Paket	14.957.500,00	23.290.000,00	23.290.000,00	8.332.500,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			20.000.000,00
	2.08.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				20 Paket	20 Paket	450.059.200,00	620.242.000,00	620.242.000,00	170.182.800,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			510.000.000,00
	2.08.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	

			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				17 Paket	17 Paket	189.989.000,00	494.935.500,00	494.935.500,00	304.946.500,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			200.000.000,00
	2.08.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	20.000.000,00	32.850.000,00	24.637.410,00	4.637.410,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			25.000.000,00
	2.08.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3 Dokumen	3 Dokumen	9.990.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	-1.990.000,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			15.000.000,00
	2.08.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																	

			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	49.990.000,00	50.400.000,00	129.600.000,00	79.610.000,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			55.000.000,00
	2.08.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	349.988.000,00	402.868.000,00	175.576.000,00	-174.412.000,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			355.000.000,00
	2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Jasa Penunjang*				3 jenis	3 jenis	84.900.000,00	155.400.000,00	155.400.000,00	70.500.000,00			-	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	-		100.000.000,00
	2.08.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			25.000.000,00
	2.08.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12/Bulan Laporan	12/Bulan Laporan	20.400.000,00	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			20.000.000,00
	2.08.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	49.500.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	70.500.000,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			55.000.000,00

	2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				3 jenis	3 jenis	547.901.200,00	506.964.076,00	506.964.076,00	-40.937.124,00			-	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	-		565.000.000,00
	2.08.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				9 Unit	9 Unit	324.981.200,00	272.814.076,00	272.814.076,00	-52.167.124,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			330.000.000,00
	2.08.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				50 Unit	50 Unit	50.000.000,00	57.300.000,00	57.300.000,00	7.300.000,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			55.000.000,00
	2.08.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	

			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	172.920.000,00	176.850.000,00	176.850.000,00	3.930.000,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			180.000.000,00
2,	**2.08.02**	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**Persentase Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender**				**100 Persen**	**100 Persen**	**2.449.829.400,00**	**2.063.108.430,00**	**1.791.763.260,00**	**70.170.600,00**							**2.520.000.000,00**
	2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Opd yang memahami PPRG*				-	1 Dokumen	150.000.000,00	109.491.830,00	82.605.860,00	-67.394.140,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia	KABUPATEN, KECAMATAN, KELURAHAN, dan DESA		160.000.000,00
	2.08.02.2.01.0008	Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota																

			Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Kab/Kota				250 Orang	250 Orang	150.000.000,00	109.491.830,00	82.605.860,00	-67.394.140,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia			160.000.000,00
	2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	*Persentase Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dalam Pemberdayaan Perempuan*				600 Orang	600 Orang	599.970.000,00	764.565.430,00	823.316.330,00	223.346.330,00			-	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia	KABUPATEN, KECAMATAN, KELURAHAN, dan DESA		640.000.000,00
	2.08.02.2.02.0001	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi																
			Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	199.984.000,00	193.245.000,00	359.990.900,00	160.006.900,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia			230.000.000,00
	2.08.02.2.02.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi																

			Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota				5 Organisasi	5 Organisasi	399.986.000,00	571.320.430,00	463.325.430,00	63.339.430,00	Kab. Tanger ang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia			410.000.000,00
	2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	*Meningkatnya Kemampuan, keterampilan, dan Kesejahteraan pada Perempuan*				1750 Orang	1750 Orang	1.699.859.400,00	1.189.051.170,00	885.841.070,00	-814.018.330,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia	KABUPATEN, KECAMATAN, KELURAHAN, dan DESA		1.720.000.000,00
	2.08.02.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota																

			Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas				250 Orang	250 Orang	1.499.942.000,00	851.479.670,00	629.583.600,00	-870.358.400,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia			1.510.000.000,00
	2.08.02.2.03.0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota																	
			Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia				1 Dokumen	1 Dokumen	199.917.400,00	337.571.500,00	256.257.470,00	56.340.070,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia			210.000.000,00
3,	**2.08.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**-**				**-**	**-**	**999.999.700,00**	**937.099.520,00**	**1.247.714.990,00**	**30.000.300,00**							**1.030.000.000,00**

	2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	450.000.000,00	387.099.880,00	285.733.350,00	-164.266.650,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia	KABUPATEN, KECAMATAN, KELURAHAN, DESA		460.000.000,00
	2.08.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota																
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	450.000.000,00	387.099.880,00	285.733.350,00	-164.266.650,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia			460.000.000,00

	2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Tersedianya tenaga pelayanan Kekerasatn Terhadap Perempuan yang terlatih*				140 Orang	140 Orang	349.999.950,00	349.999.900,00	268.519.900,00	-81.480.050,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia	KABUPATEN, KECAMATAN, KELURAHAN, DESA		360.000.000,00
	2.08.03.2.03.0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota																
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	349.999.950,00	349.999.900,00	268.519.900,00	-81.480.050,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia			360.000.000,00
4,	**2.08.04**	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	**Persentase Peningkatan Kualitas Hidup Keluarga**				**100 Persen**	**100 Persen**	**550.000.000,00**	**773.660.630,00**	**613.265.120,00**	**15.000.000,00**							**565.000.000,00**

	2.08.04.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota melalui PUSPAGA, PERCANTIK dan Sosialisasi Keluarga Layak Anak*				251 Orang	251 Orang	550.000.000,00	773.660.630,00	613.265.120,00	63.265.120,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia	KECAMATAN, KELURAHAN, DESA		565.000.000,00
	2.08.04.2.02.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																	
			Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				250 Orang	250 Orang	400.000.000,00	692.499.940,00	547.163.370,00	147.163.370,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia			410.000.000,00
	2.08.04.2.02.0003	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																	

			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	81.160.690,00	66.101.750,00	-83.898.250,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia			155.000.000,00
5,	**2.08.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	**Persentase Profil Gender dan Penyususnan Pedoman Pengumpulan Data Terpilah**				**100 Persen**	**100 Persen**	**69.999.800,00**	**51.059.800,00**	**46.839.800,00**	**40.000.200,00**							**110.000.000,00**
	2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Tersediannya data informasi gender dan anak serta profil gende*				1 Dokumen	1 Dokumen	69.999.800,00	51.059.800,00	46.839.800,00	-23.160.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia	KECAMATAN, KELURAHAN, DESA		110.000.000,00
	2.08.05.2.01.0001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota																	

			Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia				1 Dokumen	1 Dokumen	69.999.800,00	51.059.800,00	46.839.800,00	-23.160.000,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia			110.000.000,00
6,	**2.08.06**	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**Persentase Seluruh Klaster Hak Anak**				**100 Persen**	**100 Persen**	**1.429.904.800,00**	**1.165.055.400,00**	**905.067.200,00**	**5.095.200,00**							**1.435.000.000,00**
	2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	*Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi gugus tugas KLA*				100 persen	100 persen	501.636.000,00	454.653.000,00	339.286.200,00	-162.349.800,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia	KECAMATAN, KELURAHAN, DESA		360.000.000,00
	2.08.06.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota																	

			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	501.636.000,00	454.653.000,00	339.286.200,00	-162.349.800,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia			360.000.000,00
	2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	-				-	-	928.268.800,00	710.402.400,00	565.781.000,00	-362.487.800,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia	KABUPATEN, KECAMATAN, KELURAHAN, dan DESA		1.075.000.000,00
	2.08.06.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																

			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	198.360.000,00	151.054.000,00	116.718.000,00	-81.642.000,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia			360.000.000,00
	2.08.06.2.02.0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																
			Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	249.928.400,00	197.336.400,00	166.939.600,00	-82.988.800,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia			255.000.000,00
	2.08.06.2.02.0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																

			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	479.980.400,00	362.012.000,00	282.123.400,00	-197.857.000,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia			460.000.000,00
7,	**2.08.07**	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**-**				**-**	**-**	**899.999.250,00**	**858.376.900,00**	**694.572.700,00**	**30.000.750,00**							**930.000.000,00**
	2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	349.999.800,00	350.000.000,00	259.251.800,00	-90.748.000,00			-	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia	KABUPATEN, KECAMATAN, KELURAHAN, DESA		360.000.000,00
	2.08.07.2.01.0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA																	
			Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA				63 Orang	63 Orang	349.999.800,00	350.000.000,00	259.251.800,00	-90.748.000,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia			360.000.000,00

	2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Tersedianya tenaga pelayanan Kekerasatn Terhadap Anak yang terlatih*				245 Orang	245 Orang	349.999.700,00	308.377.750,00	241.931.750,00	-108.067.950,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia	KABUPATEN, KECAMATAN, KELURAHAN, DESA		360.000.000,00
	2.08.07.2.03.0005	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota																	
			Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK				1 Kegiatan	1 Kegiatan	349.999.700,00	308.377.750,00	241.931.750,00	-108.067.950,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia			360.000.000,00
		UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK							**18.376.945.824,00**	**18.539.442.654,00**	**17.735.835.358,00**	**-641.110.466,00**						**18.688.945.824,00**

	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**18.376.945.824,00**	**18.539.442.654,00**	**17.735.835.358,00**	**-641.110.466,00**							**18.688.945.824,00**
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**						**18.376.945.824,00**	**18.539.442.654,00**	**17.735.835.358,00**	**-641.110.466,00**							**18.688.945.824,00**
1,	**2.08.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**Persentase Perlindungan Terhadap Perempuan**				**100 Persen**	**100 Persen**	**999.999.700,00**	**937.099.520,00**	**1.247.714.990,00**	**30.000.300,00**							**1.030.000.000,00**
	2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	*Terlayaninya korban kekerasan terhadap perempuan sesuai standar*				100 persen	100 persen	199.999.750,00	199.999.740,00	693.461.740,00	493.461.990,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia	KABUPATEN, KECAMATAN, KELURAHAN, DESA		210.000.000,00
	2.08.03.2.02.0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota																	

			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan				185 Orang	185 Orang	199.999.750,00	199.999.740,00	693.461.740,00	493.461.990,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia			210.000.000,00
2,	**2.08.07**	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**-**				**-**	**-**	**899.999.250,00**	**858.376.900,00**	**694.572.700,00**	**30.000.750,00**							**930.000.000,00**
	2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	199.999.750,00	199.999.150,00	193.389.150,00	-6.610.600,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia	KABUPATEN, KECAMATAN, KELURAHAN, dan DESA		210.000.000,00
	2.08.07.2.02.0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																	

			Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan				152 Orang	152 Orang	199.999.750,00	199.999.150,00	193.389.150,00	-6.610.600,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia			210.000.000,00
	J U M L A H								**18.376.945.824,00**	**18.539.442.654,00**	**17.735.835.358,00**	**1.284.717.462.164,00**							**18.688.945.824,00**

BAB IV
PENUTUP

Dalam upaya membangun sistem akuntabilitas dan kinerja diperlukan proses penyusunan konsep dasar pengukuran dan perumusan indikator kinerja. Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja, bukan hanya ditentukan dalam proses penyusunannya, akan tetapi lebih banyak dipengaruhi oleh implementasi atau penerapannya.

Langkah-langkah pencapaian visi dan misi yang telah dituangkan dalam Renstra akan dievaluasi setiap tahunnya melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan atau Perjanjian Kinerja yang ditetapkan dan disepakati.

Demikian Rencana Kerja Perubahan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tangerang Tahun 2025 telah kami susun disesuaikan dengan Rencana Strategis Kabupaten Tangerang tahun 2024-2026, semoga dapat menjadi pedoman dan acuan bagi seluruh jajaran organisasi dalam mencapai Visi Misi Kabupaten Tangerang.

19. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja – OPD) merupakan Rencana Pembangunan Tahunan OPD Kabupaten Tangerang, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra-OPD dan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tangerang, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan pada Tahun 2025, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah melalui OPD maupun yang dilaksanakan oleh partisipasi masyarakat. Renja (Rencana Kerja) Perubahan OPD juga memuat kerangka regulasi dan kerangka anggaran yang dirinci menurut Musrenbang Kecamatan dan berdasarkan Forum Perangkat Daerah dan juga sudah dibagi untuk pendanaan alokasi APBD Kabupaten Tangerang, APBD Provinsi dan APBN. Renja Perubahan OPD merupakan langkah awal proses perencanaan pembangunan.

Tahunan Kabupaten Tangerang yang merupakan tindaklanjut dari Forum Perangkat Daerah Lintas Sektor Kabupaten Tangerang (Dinas Perumahan,Pemukiman, dan Pemakaman, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan ,Dinas Perhubungan, Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air, Dinas Tata Ruang dan Bangunan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah) sebagai wadah bersama antar pelaku pembangunan untuk membahas prioritas kegiatan pembangunan hasil Musrenbang Kecamatan dengan OPD atau gabungan OPD sebagai upaya mengisi Renja Perubahan OPD yang tata cara penyelenggaraannya difasilitasi oleh OPD terkait. Forum Perangkat daerah juga diselenggarakan untuk menjaring dan membahas rencana program dan kegiatan fungsi dan sub fungsi pemerintahan sesuai dengan tupoksi terkait, berdasarkan Rancangan Renja Perubahan OPD Kabupaten Tangerang dan Aspirasi Program dan Kegiatan Daerah baik itu dari tingkat kecamatan maupun masukan dari Stakeholder terkait.

Renja Perubahan OPD merupakan penjabaran dari kegiatan yang terdapat di dalam Organisasi Perangkat Daerah dengan mengacu pada Tupoksi OPD yang telah ditetapkan dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan KabupatenTangerang mengacu pada Peraturan Bupati Tangerang nomor : 15 Tahun 2023 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan KabupatenTangerang

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ,
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pengembangan Daerah,
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota,
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah,
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 17 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah,
12. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten 2010 – 2030 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2011 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tangerang tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 02 Tahun 2010 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
17. Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang Tahun 2011-2031 ;
18. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026;
19. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang;
20. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kabupaten

Tangerang.

Berdasarkan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Tangerang terdiri dari 4 (empat) bidang dengan masing-masing bidang terdiri dari 3 (tiga) Kelompok Jabatan Fungsional, 1 (satu) sekretariat dan 12 (dua belas) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dan kelompok Jabatan Fungsional.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Tangerang mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengarahkan, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Lingkungan Hidup dan Kebersihan.

Secara lengkap susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Tangerang adalah sebagai berikut :

1. **Kepala Dinas**
2. **Sekretariat :**
   2.1. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian;
   2.2. Sub Bagian Keuangan;
   2.3. Kelompok Jabatan Fungsional

3. **Bidang Tata Lingkungan :**
   3.1. Kelompok Jabatan Fungsional

4. **Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3:**
   4.1. Kelompok Jabatan Fungsional

5. **Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup:**
   5.1. Kelompok Jabatan Fungsional

6. **Bidang Konservasi Sumberdaya Alam dan Pertamanan:**
   6.1. Kelompok Jabatan Fungsional

7. **Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)**
   Terdiri dari UPTD Pengelolaan Sampah Wilayah I-IX, UPTD TPA dan UPTD Laboratorium.

8. **Kelompok Jabatan Fungsional**.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
KABUPATEN TANGERANG

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TANGERANG
NOMOR 15 TAHUN 2023
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN

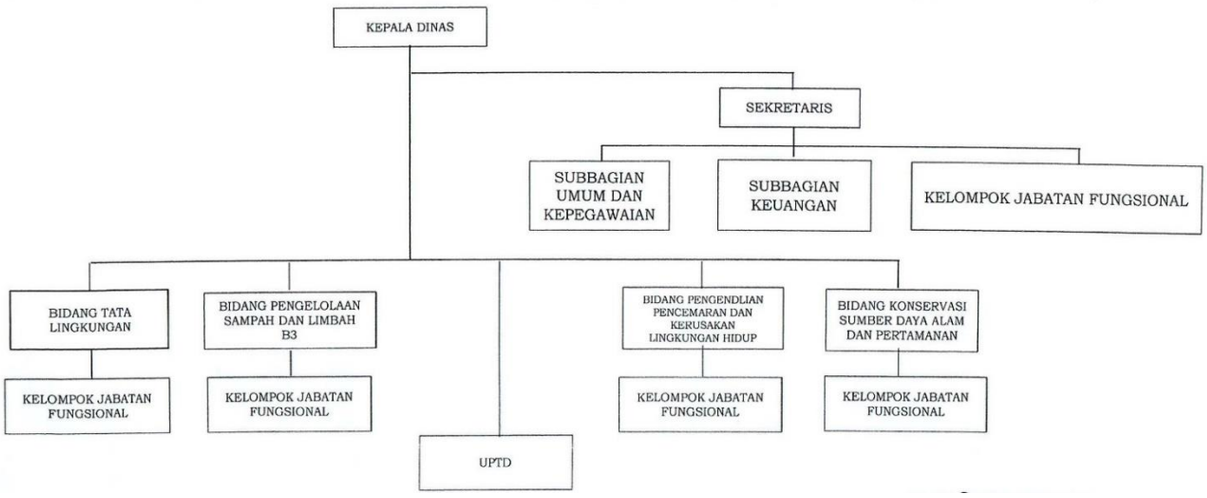

Uraian tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Tangerang secara lengkap adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Tangerang mempunyai tugas memimpin, membina, mengawasi, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan Badan, dalam menyelenggarakan tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan bidang Lingkungan Hidup yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Perundang – undangan;
2. Pelaksanaan kebijakan bidang Lingkungan Hidup terkait program dan kegiatan yang terdapat pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Tangerang;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Tangerang, dalam menyelenggarakan tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan mempunyai uraian tugas :

1. Merumuskan program kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan berdasarkan peraturan dan perundang – undangan sebagai landasan program kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan;
2. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja sesuai

dengan rencana ;

3. Membina bawahan di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dengan cara mengadakan rapat/ pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan ;
4. Mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
5. Menyelenggarakan sosialisasi pedoman / petunjuk teknis Pelaksanaan Bidang Lingkungan Hidup berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan ;
6. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Daerah dengan cara membandingkan antara program kerja dan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana kerjayang akan dating;
7. Melaporkan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Daerah sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas kinerja.
8. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.

2. Sekretaris Dinas

Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan mempunyai tugas Tugas merencanakan, melaksanakan pembinaan dan koordinasi, pengawasan dan pengendalian, bidang perencanaan, umum dan kepegawaian serta keuangan.

Dalam menjalan tugas, Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan rumusan kebijakan yang berkaitan dengan kesekretariatan meliputi perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian;
2. Penyiapan rencana dan program kerja sekretariat mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, sesuai perundang – undangan yang berlaku ;
3. Penyiapan pengandalian, pemantauan pelaksanaan tugas dan kegiatan yang berkaitan dengan keskretariatan, meliputi perncanaan, keuangan, umum dan kepegawaian untuk meningkatkan kinerja pegawai ;
4. Penyiapan bimbingan dan pembinaan kepada baawahannya dilingkup kesekretariatan meliputi perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian untuk meningkatkan kinerja pegawai;
5. Penyiapan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas kesekretariatan yang berkaitan dengan kesekretariatan, meliputi perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian ;
6. Mengendalikan mutu rencana kerja dan anggaran program dan kegiatan Dinas
7. Pengelolaan administrasi Kesekretariatan yang berkaitan dengan keskretariatan, meliputi prencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian ;
8. Pelaksanaan fasilitas Pengelola Informasi dan Dokumen (PID) ;
9. Penyiapan dan pelaksanaan pengembangan e- governance.
10. Pelaksanaan fungsi lain yang diperintah pimpinan

Dalam melaksanakan tugas Sekretaris Dinas terdiri dari :

1. Merencanakan perumusan kebijakan yang terkait dengan perencanaan, keuangan,umum dan kepegawaian Dinas;
2. Membagi tugas program kegiatan yang terkait dengan perencanaan, keuangan,umum dan kepegawaian Dinas;
3. Memberi petunjuk program kegiatan yang terkait dengan perencanaan, keuangan,umum dan kepegawaian Dinas
4. Mengatur program kegiatan yang terkait dengan perencanaan, keuangan, umumdan kepegawaian Dinas
5. Mengendalikan mutu bahan rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Strategis dalam bidang kepegawaian daerah
6. Mengendalikan mutu rencana kerja dan anggaran pada dokumen pelaksanaan anggaran Dinas
7. Mengatur program kegiatan yang terkait dengan perencanaan, keuangan, umumdan kepegawaian Dinas
8. Mengevaluasi kegiatan program yang terkait dengan perencanaan, keuangan, umumdan kepegawaian Dinas
9. Mereviu dan mengendalikan mutu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
10. Mengatur program kegiatan yang terkait dengan perencanaan, keuangan, umumdan kepegawaian Dinas
11. Mengevaluasi kegiatan program yang terkait dengan perencanaan, keuangan, umumdan kepegawaian Dinas
12. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasdan fungsinya

2.1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai Tugas melakukan penyusunan kegiatan umum dan kepegawaian dinas. Sub Bagian Umum dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dengan rincian tugas :

1. Merencanakan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, organisasi dan tatalaksana dinas;
2. Menyusun SOP, Standar Pelayanan, melaksanakan survey kepuasan masyarakat,prosedur kerja;
3. Membimbing pelaksanaan kegiatan umum meliputi : surat menyurat, penggandaan, pengiriman, pengarsipan, tata naskah dinas, Inventarisasi asset dan persediaan, pengadaan, pendistribusian, perjalanan dinas, pemeliharaan barang – barang inventarisasi dinas dan stock opname;
4. Membimbing pelaksanaan kegiatan kepegawaian meliputi : mutasi, kenaikan pangkat, kenaikan jenjang jabatan bagi jabatan fungsional tertentu, kenaikan gaji berkala, data pegawai, DUPAK, PAK, SKP, DUK, bazetting pegawai, kesejahteraan pegawai, pembinaan displin pegawai, pendidikan dan pelatihan pegawai, dan pension pegawai;
5. Membagi tugas pelaksanaan kegiatan umum meliputi : surat menyurat, penggandaan, pengiriman, pengarsipan, tata naskah dinas, inventarisasi asset dan persediaan, pengadaan, pendistribusian, perjalanan dinas, pemeliharaan barang – barang inventarisasi dinas dan stock opname;
6. Membagi tugas pelaksanaan kegiatan kepegawaian meliputi: mutasi, kenaikan pangkat, kenaikan jenjang jabatan bagi jabatan fungsional tertentu, kenaikan gaji berkala, data pegawai, DUPAK, PAK, SKP, DUK, bazetting pegawai, kesejahteraan pegawai,

pembinaan displin pegawai, pendidikan dan pelatihan pegawai, dan pension pegawai;
7. Mengevaluasi pelaksana kegiatan umum dan kepegawaian;
8. Melaksanakan fasilitasi pengelola informasi dan dokumen (PID);
9. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian dinas;
10. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.2 Sub Bag Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyusunan kegiatan keuangan Dinas. Sub bagian keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas :

1. Merencanakan kegiatan keuangan Dinas;
2. Membimbing pelaksanaan kegiatan keuangan meliputi: Pencatatan, Pembukuan, Pencairan, Pengajuan Surat Perintah Membayar Uang Persediaan, Ganti Uang,Tambah Uang Nihil, Cash Opname serta pelaporan pertanggungjawaban anggaran Dinas;
3. Membagi tugas pelaksanaan kegiatan keuangan meliputi : Pencatatan, Pembukuan, Pencairan, Pengajuan Surat Perintah Membayar Uang Persediaan, Ganti Uang, Tambah Uang, LS-Bendaharawan, LS-Pihak ketiga dan Ganti Uang Nihil, Cash Opname serta pelaporan pertanggungjawaban anggaran Dinas;
4. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang terkait keuangan;
5. Membuat laporan Neraca, Laporan Ralisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Cash Opname dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CLAK);
6. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai Tugas melakukan penyusunan kegiatan umum dan kepegawaian dinas. Sub Bagian Umum dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dengan rincian tugas :

1. Merencanakan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, organisasi dan tatalaksana dinas;
2. Menyusun SOP, Standar Pelayanan, melaksanakan survey kepuasan masyarakat,prosedur kerja;
3. Membimbing pelaksanaan kegiatan umum meliputi : surat menyurat, penggandaan, pengiriman, pengarsipan, tata naskah dinas, Inventarisasi asset dan persediaan, pengadaan, pendistribusian, perjalanan dinas, pemeliharaan barang – barang inventarisasi dinas dan stock opname;
4. Membimbing pelaksanaan kegiatan kepegawaian meliputi : mutasi, kenaikan pangkat, kenaikan jenjang jabatan bagi jabatan fungsional tertentu, kenaikan gaji berkala, data pegawai, DUPAK, PAK, SKP, DUK, bazetting pegawai, kesejahteraan pegawai, pembinaan displin pegawai, pendidikan dan pelatihan pegawai, dan pension pegawai;
5. Membagi tugas pelaksanaan kegiatan umum meliputi : surat menyurat, penggandaan, pengiriman, pengarsipan, tata naskah dinas, inventarisasi asset dan persediaan, pengadaan, pendistribusian, perjalanan dinas, pemeliharaan barang – barang inventarisasi dinas dan stock opname;
6. Membagi tugas pelaksanaan kegiatan kepegawaian meliputi: mutasi,

kenaikan pangkat, kenaikan jenjang jabatan bagi jabatan fungsional tertentu, kenaikan gaji berkala, data pegawai, DUPAK, PAK, SKP, DUK, bazetting pegawai, kesejahteraan pegawai, pembinaan displin pegawai, pendidikan dan pelatihan pegawai, dan pension pegawai;
7. Mengevaluasi pelaksana kegiatan umum dan kepegawaian;
8. Melaksanakan fasilitasi pengelola informasi dan dokumen (PID);
9. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian dinas;
10. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Tata Lingkungan

Bidang Tata Lingkungan mempunyai Tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koodinasi, pembinaan dan pengendalian bidang Tata Lingkungan, Bidang Tata Lingkungan dipimpin kepala bidang, dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Tata Lingkungan mempunyai fungsi :

1. Penyiapan perumusan kebijakan teknis yang berkaitan dengan bidang tata lingkungan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Perundang - undangan;
2. Penyiapan Rencana dan Program kegiatan yang berkaitan dengan bidang tata lingkungan;
3. Penyiapan Pengandalian dan Pengawasan bidang tata lingkungan;
4. Penyiapan bimbingan teknis pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan bidang tata lingkungan
5. Pengelolaan administrasi bidang tata lingkungan.
6. Merencanakan perlindungan dan pengelolaan Lingkungan hidup
7. Menyelenggarakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
8. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin pusat penelitian lingkungan hidup diterbitkan oleh Pemerintah Daerah
9. Melaksanakan pengakuan Masyarakat Hukum Adat, Kearifan local, pengetahuan tradisional dan hak msayarakat hokum adat yang terkait dengan pusat penelitian lingkungan hidup
10. Melaksanakan penyelanggaraan pendidikan , pelatihan dan penyuluhan lingkungan Hidup untuk Lembaga kemasayarakatan tingkat daerah.

Dalam melaksanakan fungsi Kepala Bidang Tata Lingkungan Mempunyai tugas:

1. Merencanqkan perumusan kebijakan teknis yag berkaitan dengan Bidang Tata Lingkungan
   mengacu kepada rencana pembangunan jangka menengah Daerah dan perundang – undangan;
2. Penyiapan renxana dan program kegiata yang berkaitan dengan bidang tata lingkungan ;
3. Penyiapan pengendalian dan pengawasan bidang tata lingkungan;
4. Penyiapan bimbingan teknis dalam pelaksanaan kegiatan yang berkaiatan dengan bidang tata lingkungan ;
5. Pengelolaan adminstrasi bidang tata lingkungan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh pimpinan

4. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3

Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 melaksanakan

penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 dipimpin oleh Kepala Bidang.

Selain melaksanakan tugas Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 mempunyai fungsi;

1. Penyiapan rumusan kebijakan teknis yang berkaitan dengan Bidang Pengelolaan Sampah Dan Limbah B3 mengacu kepada rencana pembangunan jangka menengah daerah dan perundang-undangan;
2. Penyiapan rencana dan program yang berkaitan dengan bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 ;
3. Penyiapan pengendalian program dan pengawasan Kegiatan Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3
4. Penyiapan pengendalian program dan pengawasan Kegiatan Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3
5. Penyiapan bimbingan teknis pelaksanaan tugas bidang pengelolaan bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3
6. Penyiapan bantuan teknis pembangunan bangunan Gedung negara milik Daerah ;
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh pimpinan

Selain melaksanakan fungsi, kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 juga mempunyai tugas:

1. Merencanakan perumusan kebijakan program bidang meliputi, pengurangan dan pengolahan sampah, pengumpulan dan pengangkutan sampah serta limbah B3;
2. Membagi tugas kepada bawahan dibidang meliputi, pengurangan dan pengolahan sampah, pengumpulan dan pengangkutan sampah serta limbah B3;
3. Memberi petunjuk program pelaksanaan tugas kepada bawahan di bidang meliputi, pengurangan dan pengolahan sampah, pengumpulan dan pengangkutan sampah serta limbah B3;
4. Mengatur penyusunan program dan kegiatan bidang meliputi, pengurangan dan pengolahan sampah, pengumpulan dan pengangkutan sampah serta limbah B3;
5. Melaksanakan penyusunan program kegiatan bidang meliputi, pengurangan dan pengolahan sampah, pengumpulan dan pengangkutan sampah serta limbah B3;
6. Memonitoring dan mengevaluasi kegiatan program pelaksanaan tugas bidang meliputi, pengurangan dan sampah serta limbah B3;
7. Melaksanakan penerbitan izin pendaurulangan sampah atau pengelolaan sampah, pengangkuran sampah dan pemrosesan akhir sampah yang di selenggarakan oleh swasta
8. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang di selenggarakan oleh pihak swasta ; dan
9. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dipimpin oleh Kepala Bidang. Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Konservasi Sumberdaya Alam Dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan

untuk mempunyai tugas :

1. Penyiapan rumusan kebijakan teknis yang berkaitan dengan Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Perundang – undangan.
2. Penyiapan rencana dan program bidang Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan;
3. Penyiapan Pengendalian Program dan Kebijakan bidang Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan;
4. Penyiapan Pengendalian Program dan Kebijakan bidang Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan;
5. Penyiapan Bimibingan Teknis dan Kebijakan Program dalam pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan bidang pengendalian pencemaran kerusakan lingkungan;
6. Pengelolaan administrasi dalam pelaksanaan program yang berkaitan dengan bidang pengendalian pencemaran kerusakan lingkungan;
7. Merencanakan perumusan kebijakan program bidang pengendalian pencemaran kerusakan lingkungan meliputi : pemantauan kualitas lingkungan , pengawasan dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan serta Bina Hukum Lingkungan;
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

6. Bidang Konservasi Sumber Daya Alam dan Pertamanan

Bidang Konsevasi Sumber Daya Alam dan Pertamanan melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian Bidang Konservasi. Selain melaksanakan tugas, Kepala Bidang Konservasi Sumber Daya Alam dan Pertamanan juga mempunyai fungsi;

1. Penyiapan rumusan Kebijakan Teknis yang berkautan dengan bidang Konservasi Sumber Daya Alam dan Pertamanan mengacu kepada Rencana Pembangunan jangka menengah daerah dan perundang-undangan;
2. Penyiapan rencana program yang berkaitan dengan Konservasi Sumber DayaAlam dan Pertamanan;
3. Penyiapan pengendalian progran dan kebijakan bidang Konservasi Sumber Daya Alam dan Pertamanan ;
4. Penyiapan Bimbingan Teknis dan Kebijakan Program dalam pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan bidang Konservasi Sumber Daya Alam dan Pertamanan;
5. Pengelolaan administrasi dan pelaksanaan program yang berkaitan dengan bidang Konservasi Sumber Daya Alam dan Pertamanan

Selain melaksanakan fungsi, kepala Bidang Konservasi Sumber Daya Alam dan Pertamanan juga mempunyai tugas :

1. Merencanakan program meliputi konservasi, rehabilitasi lahan kritis dan keanekaragaman hayati, pembangunan dan penataan pertamanan dan ruang terbuka hijau serta Reklame;
2. Membagi tugas kepada bawahan bidang meliputi : konservasi, rehabilitasi lahan kritis dan keanekaragaman hayati, pembangunan dan penataan pertamanan dan ruang terbuka hijau serta reklame
3. Memberi petunjuk program pelaksanaan tugas kepada bawahan bidang meliputi : konservasi, rehabilitasi lahan kritis dan keanekaragaman hayati, pembangunan dan penataan pertamanan

dan ruang terbuka hijau serta reklame;

4. Mengatur penyusunan program dan kegiatan bidang meliputi : konservasi, rehabilitasi lahan kritis dan keanekaragaman hayati, pembangunan dan penataan pertamanan dan ruang terbuka hijau serta reklame;

5. Mengevaluasi kegiatan program pelaksanaan tugas dibidang konservasi, rehabilitasi lahan kritis dan keanekaragaman hayati, pembangunan dan penataan pertamanan dan ruang terbuka hijau serta reklame;

6. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. **Unit Pelaksana Teknis**

Unit Pelaksana Teknis melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di lingkungan Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, Unit pelaksana teknis dibentuk berdasarkan kriteria adanya pekerjaan yang bersifat teknis operasional karena wilayah kerja atau karena jam tertentu, Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis diatur dengan peraturan Bupati. Unit Pelaksana Teknis terdiri dari:

a. UPTD Tempat Pemrosesan Akhir sesuai dengan Perbup Nomor 49 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir Pada Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kabupaten Tangerang;
b. UPTD Laboratorium Lingkungan sesuai dengan Perbup Nomor 51 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan Pada Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kabupaten Tangerang;
c. UPTD Perlengkapan dan Perbekalan sesuai dengan Perbup Nomor 52 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,Fungsi, Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlengkapan Dan Perbekalan Pada Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kabupaten Tangerang;
d. UPTD Pengelolaan sampah Wilayah I – IX sesuai dengan Perbup Nomor 50 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Sampah Pada Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kabupaten Tangerang

9. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang tugasnya, dalam pelaksanaan tugas pokok berpedoman kepada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas, dalam pelaksanaan tugas dikoordinasikan oleh tenaga fungsional, adapun Jenis dan jenjang jabatan

fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud dari Renja OPD adalah untuk memberikan arahan dan pedoman perencanaan pembangunan Tahunan Kabupaten Tangerang untuk Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan Isu Strategis , Kebijakan Pembangunan Tahun 2025.

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Tangerang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Sebagai acuan dalam menyusun arah kegiatan dan pencapaian target kinerja agar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;
2. Sebagai alat ukur dalam melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan SKPD Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Tangerang;
3. Sebagai bahan masukan bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
4. Sebagai acuan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Tangerang;
5. Sebagai tolok ukur menjabarkan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistimatika Penulisan Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Tangerang sesuai dengan ketentuan peraturan yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renja, landasan hukum penyusunan Renja, maksud dan tujuan penyusunan Renja, Tugas Pokok dan Fungsi, Stuktur Organisasi dan sistematika penulisan dokumen Renja.

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

Bab ini memuat tentang evaluasi dan realisasi Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Tangerang Triwulan I Tahun Anggaran 2025.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada Bab ini bersisi tantang Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan tahun 2025

BAB IV PENUTUP

Berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Tangerang disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman atau tindak lanjut tahapan perencanaan tahun berikutnya yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Tangerang .

BAB II
EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Triwulan II Tahun 2025

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Tangerang pada TahunAnggaran 2025 mendapatkan pagu Anggaran sebesar Rp **228.024.641.176** Rincian Anggaran Belanja Pegawai senilai Rp 22.957.035.073 Belanja Barang dan Jasa Rp 103.553.229.821 dan belanja Modal 101.514.376.282

Penyerapan Anggaran sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 telah terserap Capaian anggaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Sebesar 16.09% atau terealisasi sebesar Rp. **36.683.651.775** dari total anggaran Rp. **228.024.641.176.**

Evaluasi capaian program dan kegiatan dilaksanakan setiap Triwulan dengan menggunakan sumber dana APBD TA. 2025. Adapun di Triwulan I dilakukan evaluasi kinerja. Evaluasi ini meliputi evaluasi capaian fisik dan anggaran dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Data Laporan Realisasi Anggaran sampai dengan Triwulan I Tahun Anggaran 2025 per-01 Januari 2025 Sampai Dengan 31 Maret 2025 sebagai berikut:

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN (%)	REALISASI FISIK KEGIATAN (%)	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	SATUAN	TARGET INDIKATOR	REALISASI INDIKATOR	CAPAIAN (%)	PERANGKAT DAERAH
2.11.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA**	**71.780.882.249**	**18.818.729.035**	**26,22**	**27**	Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah DLHK	Persen	**100**	**25**	**25**	**DLJK**
2.11.01.2.01	**PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH**	**1.028.459.410**	**14.600.000**	**1,42**	**5**	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen	**7**	**1**	**14**	**DLJK**
2.11.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	88.123.860	**0**	**0**	**0**	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	**4**	**0**	**0**	**DLJK**
2.11.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	39.118.550	**0**	**0**	**0**	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	dokumen	**2**	**0**	**0**	**DLJK**
2.11.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	34.050.000	**0**	**0**	**0**	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	dokumen	**1**	**0**	**0**	**DLJK**

2.11.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	80.924.000	14.600.000	18,04	**20**	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	**Laporan**	**5**	**1**	**20**	**DLJK**
2.11.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	786.243.000	**0**	**0**	**0**	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	**5**	**0**	**0**	**DLJK**
2.11.01.2.02	**ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH**	**23.104.600.073**	**5.780.663.036**	**25,02**	**25**	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persen**	**100**	**25**	**25**	**DLJK**
2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	22.957.035.073	5.728.623.036	24,95	**25**	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	**95**	**95**	**100**	**DLJK**
2.11.01.2.02.0005	koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	35.935.000	24.890.000	69,26	**27**	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	**Laporan**	**1**	**0**	**0**	**DLJK**
2.11.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	111.630.000	27.150.000	24,32	**25**	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	**4**	**1**	**25**	**DLJK**

2.11.01.2.03	**ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH**	**11.272.000**	**0**	**0**	**0**	Persentase Ketersediaan Dokumen Laporan Barang Milik Daerah	**Persen**	**100**	**0**	**0**	**DLJK**
2.11.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	11.272.000	**0**	**0**	**0**	umlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	**3**	**0**	**0**	**DLJK**
2.11.01.2.05	**ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH**	**103.460.000**	**0**	**0**	**0**	Prosentase aparatur yang meningkat kapasitasny	**Persen**	**100**	**0**	**0**	**DLJK**
2.11.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	103.460.000	**0**	**0**	**0**	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	**Orang**	**87**	**0**	**0**	**DLJK**
2.11.01.2.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	1.824.939.290	945.479.420	51,81	**53**	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persen**	**100**	**50**	**50**	**DLJK**
2.11.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	699.752.590	602.541.820	86,11	**90**	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	10	**8**	**80**	**DLJK**

2.11.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	214.187.700	162.393.100	75,8	**80**	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	**2**	**1**	**50**	**DLJK**
2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	76.640.000	24.220.500	31,6	**33**	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	**2**	**1**	**50**	**DLJK**
2.11.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	267.200.000	47.500.000	17,78	**20**	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	**dokumen**	**12**	**3**	**25**	**DLJK**
2.11.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	213.744.000	57.654.000	26,97	**30**	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	**Laporan**	**12**	**3**	**25**	**DLJK**
2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	324.393.000,00	47.520.000	14,65	**17**	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	**Laporan**	**12**	**3**	**25**	**DLJK**
2.11.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	29.022.000	3.650.000	12,58	**15**	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	**dokumen**	**12**	**3**	**25**	**DLJK**

2.11.01.2.08	**PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**44.279.079.968**	**11.521.895.751**	**26,02**	**28**	Persentase pemenuhan Jasa Penunjang	**Persen**	**100**	**25**	**25**	**DLJK**
2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	314.986.400	27.509.251	8,73	**10**	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	**Laporan**	**12**	**3**	**25**	**DLJK**
2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	43.964.093.568	11.494.386.500	26,14	**28**	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	**Laporan**	**12**	**3**	**25**	**DLJK**
2.11.01.2.09	**PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**1.429.071.508**	**556.090.828**	**38,91**	**40**	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	**Persen**	**100**	**25**	**25**	**DLJK**
2.11.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	406.806.508	56.578.828	13,91	**15**	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	**Unit**	**250**	**83**	**33,2**	**DLJK**
2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	361.100.000	72.079.500	19,96	**22**	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	**Unit**	**250**	**83**	**33,2**	**DLJK**

2.11.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	661.165.000	427.432.500,00	64,65	**65**	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	**Unit**	**2**	**1**	**50**	**DLJK**
2.11.02	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	**2.332.148.800,00**	**53.918.000,00**	**2,31**	**15%**	**Prosentase dokumen Lingkungan Hidup**	**%**	**33**	**-**	**0**	**DLHK**
2.11.02.2.01	**Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota**	**771.095.600,00**	**46.812.000,00**	**6,07**	**15%**	**Jumlah Dokumen Hasil kajian RPPLH**	**Dokumen**	**3**	**-**	**0**	**DLHK**
2.11.02.2.01.0006	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	544.992.000,00	12.492.000,00	2,29	10%	jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	Dokumen	2	-	0	DLHK
2.11.02.2.01.0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	226.103.600,00	34.320.000,00	15,18	20%	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	Dokumen	40	17	0	DLHK
2.11.02.2.02	**Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota**	**1.561.053.200,00**	**7.106.000,00**	**0,46**	**10%**	**Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaran Kajian Lingkungan Hidup Strategis KLHS Kabupaten / Kota**	**Dokumen**	**3**	**-**	**0**	**DLHK**

2.11.02.2.02.0005	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	1.561.053.200,00	7.106.000,00	0,46	10%	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	Dokumen	6	-	0	DLHK
2.11.03	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	1.523.172.520,00	0	**0,00**	**8%**	**Persentase Peningkatan Kualitas Lingkungan Udara, Air**	**%**	**62,5**	**-**	**0**	**DLHK**
2.11.03.2.01	**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	1.523.172.520,00	**Rp0**	**0,00**	**8%**	**Meningkatnya IKA**	**Nilai**	**1**	**-**	**0**	**DLHK**
2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Rp1.212.078.520	Rp0	0,00	0%	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Dokumen	1	-	0,00%	DLHK
2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota (UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup)	2.260.415.928,00	137.024.482,00	6,06	10%	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen	Dokumen	1000	288	28	DLHK
2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	311.094.000,00	Rp0	0,00	0%	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Dokumen	1	1	100.00 %	DLHK

2.11.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	**328.917.000,00**	**Rp0**	**0,00**	**0%**	**Prosentase Pelaku Usaha yang memiliki dokumen lingkungan hidup**	**%**	**300**	**50**	**16,6**	**DLHK**
2 11 06 2.01	**Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**328.917.000,00**	**Rp0**	**0,00**	**0%**	**Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha / Kegiatan Usaha**	**Dokumen**	**200**	**50**	**25**	**DLHK**
2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	328.917.000,00	Rp0	0,00	0%	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Dokumen	200	50	25	DLHK
2.11.09	**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**741.396.000,00**	**1.400.000,00**	**0,19**	**10%**	**Prosentase Pembinaan dan Penilaian Terhadap Kinerja Msyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup**	**%**	**25**	**25**	**100.00 %**	**DLHK**
2 11 09 2.01	**Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**741.396.000,00**	**1.400.000,00**	**0,19**	**10%**	**Terlaksananya pembinaan dan penilaian terhadap kinerja masyarakat**	**Entitas**	**25**	**25**	**100.00 %**	**DLHK**
2.11.09.2.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	741.396.000,00	1.400.000,00	0,19	**10%**	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Entitas	25	25	100.00 %	DLHK
2.11.10	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	**274.043.500,00**	**Rp0**	**0,00**	**0%**	**Persentase Penanganan Pengaduan Pengelolaan Lingkungan Hidup**	**%**	**200**	**50**	**25**	**DLHK**

2 11 10 2.01	**Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota**	**274.043.500,00**	**Rp0**	**0,00**	**0%**	**Jumlah Pengaduan yang telah terverifikasi**	**Kasus**	**200**	**40**	**35**	**DLHK**
2.11.10.2.01.0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	274.043.500,00	Rp0	0,00	0%	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	Laporan	200	50		DLHK
2.11.04	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	**Rp17.954.677.250**	**Rp1.573.872.732**	**8,77**	**15**	**Persentase Kawasan Keanekaragaman Hayati yang Terkelola**	**%**	**1,2**	**0,3**	**25**	**DLHK**
2.11.04.2.01	**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**	**Rp17.954.677.250**	**Rp1.573.872.732**	**8,77**	**15**	**Meningkatnya Pengelolaan RTH**	**hektar**	**2**	**0,5**	**25**	**DLHK**
2.11.04.2.01.0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Rp164.380.000	Rp0	0,00	0	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	Dokumen	1	-	0	DLHK
2.11.04.2.01.0009	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Rp10.256.232.850	Rp175.800.000	1,71	5	Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Unit	5	-	0	DLHK
2.11.04.2.01.0006	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Rp38.923.600	Rp0	0,00	0	Jumlah Orang yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Orang	30	-	0	DLHK
2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Rp2.506.323.600	Rp516.656.732	20,61	25	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	hektar	131		0	DLHK
2.11.04.2.01.0008	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Rp1.490.770.000	Rp488.000.000	32,73	35	Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Unit	4	2	50	DLHK

2.11.04.2.01.0007	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Rp3.498.047.200	Rp393.416.000	11,25	15	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	Unit	70	3	5	DLHK
2.11.05	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**	**Rp95.227.740**	**Rp15.750.000**	**16,54**	**20**	**Presentase Tindak Lanjut Pengaduan Pengelolaan Limbah B3**	**%**	**100**	**58**	**58**	**DLHK**
2 11 05 2.01	**Penyimpanan sementara Limbah B3**	**Rp95.227.740**	**Rp15.750.000**	**16,54**	**20**	**Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta**	**Laporan**	**100**	**58**	**58**	**DLHK**
2.11.05.2.01.0002	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Rp95.227.740	Rp15.750.000	16,54	20	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	Laporan	100	58	58	DLHK
2.11.11	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**Rp104.267.511.463**	**Rp4.329.638.200**	**4,15**	**5**	**Persentase Timbulan Sampah yang Terkelola**	**%**	**62**	**15**	**100.00 %**	**DLHK**
2.11.11.2.01	**Pengelolaan Sampah**	**Rp104.267.511.463**	**Rp4.329.638.200**	**4,15**	**5**	**Persentase Pengelolaan Sampah**	**%**	**62**	**15**	**100.00 %**	**DLHK**
2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Rp65.857.122.441	Rp1.581.660.000	2,40	5	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan,Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Unit	50	12	100.00 %	**DLHK**

2.11.11.2.01.0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan	7.582.150.000	Rp1.442.156.175	19,02	25	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	Ton	525.000	131.250	100.00 %	**DLHK**
2.11.11.2.01.0013	Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah	29.819.983.022	Rp1.197.822.025	4,02	5	Jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali	Ton	302.812	75.703	100.00 %	**DLHK**
2.11.11.2.01.03	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota (UPTD 1)	Rp1.059.874.992	Rp226.421.775	21,36	25	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Ton	24.859	6.215	25	DLHK
2.11.11.2.01.03	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota (UPTD 2)	Rp1.196.370.000	Rp237.253.433	19,83	20	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Ton	24.859	6.147	25	DLHK
2.11.11.2.01.03	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota (UPTD 3)	Rp1.218.036.000	Rp268.225.920	22,02	25	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Ton	25.419	6.354	25	DLHK
2.11.11.2.01.03	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota (UPTD 4)	Rp1.164.780.000	Rp254.344.393	21,84	25	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Ton	27.891	6.973	25	DLHK

2.11.11.2.01.03	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota (UPTD 5)	Rp976.314.000	Rp205.484.690	21,05	25	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Ton	23.536	5.884	25	DLHK
2.11.11.2.01.03	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota (UPTD 6)	Rp1.428.766.992	Rp315.797.244	22,1	25	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Ton	22.414	5.603	25	DLHK
2.11.11.2.01.03	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota (UPTD 7)	Rp1.088.262.000	Rp242.805.320	22,31	25	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Ton	21.668	5.417	25	DLHK
2.11.11.2.01.03	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota (UPTD 8)	Rp1.199.550.000	Rp250.525.645	20,88	25	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Ton	26.591	6.648	25	DLHK
2.11.11.2.01.03	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota (UPTD 9)	Rp1.043.874.000	Rp206.415.376	19,77	20	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Ton	29.062	7.320	20	DLHK

2.11.11.2.01.03	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota (UPTD TPA Jatiwaringin)	Rp6.785.200.992	Rp1.158.471.800	17,07	20	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Ton	985.020	246.255	25	DLHK
2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Rp1.008.256.000	Rp108.000.000	10,71	15	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	Kelompok	50	12	41,2	DLHK
2.11.11.2.01.0009	Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah (UPTD Peralatan dan Perbekalan)	Rp9.305.219.750,00	Rp6.197.676.500	66,6	70	Jumlah fasilitas penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	Unit	300	210	70	DLHK

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Perubahan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan telah bersinergi dengan RPJMD/ RPD 2024 – 2026, dan telah berkordinasi dengan Bappeda Kabupaten Tangerang terkait kebutuhan prioritas pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Tangerang, Berdasarkan kebijakan dan evaluasi kinerja triwulan I , Dan pada Rencana Kerja Perubahan semula pada APBD Murni 2025 senilai Rp **228.024.641.176** mengalami kenaikan anggaran Rp **1.284.717.462.164,** sehingga total Renja Perubahan senilai Rp **235.897.063.343** makan disusunlah Rencana Kerja Perubahan Program dan Kegiatan Tahun 2025 yaitu:

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KAB. TANGERANG TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13
		DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN				**143.118.430.150,00**	**230.564.007.766,00**	**235.897.063.343,00**	**92.778.633.193,00**
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**143.118.430.150,00**	**230.564.007.766,00**	**235.897.063.343,00**	**92.778.633.193,00**
	2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**				**143.118.430.150,00**	**230.564.007.766,00**	**235.897.063.343,00**	**92.778.633.193,00**
1,	**2.11.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah DLHK**	**100 Persen**	**100 Persen**	**74.006.503.575,00**	**72.390.460.369,00**	**76.518.619.779,00**	**4.301.522.913,00**
	2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	7 dokumen	7 dokumen	1.105.629.450,00	1.190.858.530,00	1.028.459.410,00	-77.170.040,00
	2.11.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	464.779.450,00	102.925.980,00	88.123.860,00	-376.655.590,00
	2.11.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD							

			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	107.650.000,00	46.308.550,00	39.118.550,00	-68.531.450,00
	2.11.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD							
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	65.800.000,00	44.890.000,00	34.050.000,00	-31.750.000,00
	2.11.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	5 Laporan	60.400.000,00	91.950.000,00	80.924.000,00	20.524.000,00
	2.11.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	5 Laporan	407.000.000,00	904.784.000,00	786.243.000,00	379.243.000,00
	2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	100 persen	100 persen	23.045.582.425,00	23.155.690.073,00	23.390.337.603,00	344.755.178,00
	2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	95 Orang/bulan	95 Orang/bulan	22.588.464.925,00	22.957.035.073,00	23.242.772.603,00	654.307.678,00

	2.11.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD							
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	46.445.000,00	35.935.000,00	35.935.000,00	-10.510.000,00
	2.11.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD							
NO	**KODE**	**URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN**	**INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN**	**CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN**					
				TARGET 2025		**PAGU INDIKATIF (Rp)**			**Bertambah/Berkurang (10-12)**
				SEBELUM	**SESUDAH**	**RKPD 2025**	**APBD 2025**	**RKPD PERUBAHAN 2025**	
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	4 Laporan	4 Laporan	410.672.500,00	162.720.000,00	111.630.000,00	-299.042.500,00
	2.11.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase Ketersediaan Dokumen Laporan Barang Milik Daerah*	100 persen	100 persen	14.800.000,00	15.224.000,00	11.272.000,00	-3.528.000,00
	2.11.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD							
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen	14.800.000,00	15.224.000,00	11.272.000,00	-3.528.000,00

	2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Prosentase aparatur yang meningkat kapasitasnya*	100 persen	100 persen	105.714.000,00	124.830.000,00	103.460.000,00	-2.254.000,00
	2.11.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan							
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	87 Orang	87 Orang	105.714.000,00	124.830.000,00	103.460.000,00	-2.254.000,00
	2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	100 persen	100 persen	1.596.242.100,00	2.195.706.290,00	1.824.939.290,00	228.697.190,00
	2.11.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	379.102.000,00	699.752.590,00	699.752.590,00	320.650.590,00
	2.11.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	324.045.300,00	214.187.700,00	214.187.700,00	-109.857.600,00
	2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	145.769.800,00	101.020.000,00	76.640.000,00	-69.129.800,00
	2.11.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan							

			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	100.000.000,00	267.200.000,00	267.200.000,00	167.200.000,00
	2.11.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu							
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	108.400.000,00	230.616.000,00	213.744.000,00	105.344.000,00
	2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	523.775.000,00	649.156.000,00	324.393.000,00	-199.382.000,00
	2.11.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD							
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	15.150.000,00	33.774.000,00	29.022.000,00	13.872.000,00
	2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pemenuhan Jasa Penunjang*	100 persen	100 persen	46.821.184.200,00	44.279.079.968,00	48.731.079.968,00	1.909.895.768,00
	2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	65.984.200,00	314.986.400,00	314.986.400,00	249.002.200,00
	2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	46.755.200.000,00	43.964.093.568,00	48.416.093.568,00	1.660.893.568,00
	2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah*	100 persen	100 persen	1.317.351.400,00	1.429.071.508,00	1.429.071.508,00	111.720.108,00
	2.11.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	250 Unit	250 Unit	458.751.400,00	406.806.508,00	406.806.508,00	-51.944.892,00
	2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	250 Unit	250 Unit	361.100.000,00	361.100.000,00	361.100.000,00	0,00
	2.11.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	497.500.000,00	661.165.000,00	661.165.000,00	163.665.000,00
2,	**2.11.02**	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase Dokumen Lingkungan Hidup**	-	**33 %**	**2.383.792.000,00**	**3.090.174.070,00**	**2.332.148.800,00**	**178.727.050,00**
	2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Hasil kajian RPPLH*	-	3 Dokumen	1.045.516.000,00	982.844.870,00	771.095.600,00	-274.420.400,00

	2.11.02.2.01.0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota							
			Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	40 Dokumen	40 Dokumen	356.364.000,00	282.626.870,00	226.103.600,00	-130.260.400,00
	2.11.02.2.01.0006	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota							
			jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	2 Dokumen	2 Dokumen	689.152.000,00	700.218.000,00	544.992.000,00	-144.160.000,00
	2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaran Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten / Kota*	3 Dokumen	3 Dokumen	1.338.276.000,00	2.107.329.200,00	1.561.053.200,00	222.777.200,00
	2.11.02.2.02.0005	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang							
			Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	6 Dokumen	6 Dokumen	1.338.276.000,00	2.107.329.200,00	1.561.053.200,00	222.777.200,00
3,	**2.11.03**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase Peningkatan Kualitas Lingkungan Udara, Air dan Tanah**	**1,5 Persen**	**1,5 Persen**	**4.095.140.000,00**	**3.993.172.848,00**	**3.783.588.448,00**	**2.054.860.000,00**
	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	*Meningkatnya IKA*	72 Nilai	72 Nilai	4.095.140.000,00	3.993.172.848,00	3.783.588.448,00	-311.551.552,00

	2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut							
			Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	100 Dokumen	1 Dokumen	2.048.000.000,00	1.280.850.520,00	1.212.078.520,00	-835.921.480,00
	2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim							
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	1 Dokumen	115.000.000,00	429.908.000,00	311.094.000,00	196.094.000,00
4,	**2.11.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	**Persentase kawasan keanekaragaman hayati yang terkelola**	**1,2 %**	**1,2 %**	**6.137.009.375,00**	**18.120.043.150,00**	**18.952.359.977,00**	**-287.009.375,00**
	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	*Meningkatnya Pengelolaan RTH*	2 Ha	2 Ha	6.137.009.375,00	18.120.043.150,00	18.952.359.977,00	12.815.350.602,00
	2.11.04.2.01.0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati							
			Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	165.840.000,00	164.380.000,00	114.380.000,00
	2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)							
			Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	131 Ha	2 Ha	2.657.196.800,00	2.506.323.600,00	2.506.323.600,00	-150.873.200,00
	2.11.04.2.01.0006	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati							
NO	**KODE**	**URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM**		**CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN**					

		/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13
			Jumlah Orang yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	30 Orang	30 Orang	30.000.000,00	49.663.000,00	38.923.600,00	8.923.600,00
	2.11.04.2.01.0007	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati							
			Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	70 Unit	70 Unit	400.000.000,00	3.498.047.200,00	3.498.047.200,00	3.098.047.200,00
	2.11.04.2.01.0008	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya							
			Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Unit	4 Unit	1.000.004.400,00	1.490.770.000,00	1.490.770.000,00	490.765.600,00
	2.11.04.2.01.0009	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan							
			Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Unit	5 Unit	1.999.808.175,00	10.409.399.350,00	11.253.915.577,00	9.254.107.402,00
5,	**2.11.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**	**Presentase Tindak Lanjut Pengaduan Pengelolaan Limbah B3**	**100 Persen**	**100 Persen**	**202.500.000,00**	**135.790.240,00**	**95.227.740,00**	**22.500.000,00**

	2.11.05.2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3	*Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta*	80 Laporan	80 Laporan	202.500.000,00	135.790.240,00	95.227.740,00	-107.272.260,00
	2.11.05.2.01.0002	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3							
			Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	100 Laporan	100 Laporan	202.500.000,00	135.790.240,00	95.227.740,00	-107.272.260,00
6,	**2.11.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	**Jumlah Pelaku Usaha yang Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup**	**85 persen**	**85 persen**	**265.095.000,00**	**433.693.000,00**	**328.917.000,00**	**9.905.000,00**
	2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha / Kegiatan Usaha*	150 Dokumen	100 Dokumen	265.095.000,00	433.693.000,00	328.917.000,00	63.822.000,00
	2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH							
			Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	200 Dokumen	100 Dokumen	265.095.000,00	433.693.000,00	328.917.000,00	63.822.000,00

7,	**2.11.09**	**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**Persentase Pembinaan dan Penilaian terhadap Kinerja Masyarakat**	**27 Persen**	**27 Persen**	**765.530.000,00**	**780.953.400,00**	**741.396.000,00**	**-15.530.000,00**
	2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya pembinaan dan penilaian terhadap kinerja masyarakat*	25 Entitas	27 Entitas	765.530.000,00	780.953.400,00	741.396.000,00	-24.134.000,00
	2.11.09.2.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup							
			Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	25 Entitas	25 Entitas	765.530.000,00	780.953.400,00	741.396.000,00	-24.134.000,00
8,	**2.11.10**	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase Penanganan Pengaduan Pengelolaan Lingkungan Hidup**	**100 Persen**	**100 Persen**	**224.900.000,00**	**342.653.500,00**	**274.043.500,00**	**25.100.000,00**
	2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	*Jumlah Pengaduan yang telah terverifikasi*	-	80 Kasus	224.900.000,00	342.653.500,00	274.043.500,00	49.143.500,00
	2.11.10.2.01.0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota							
			Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	200 Pengaduan	80 Pengaduan	224.900.000,00	342.653.500,00	274.043.500,00	49.143.500,00

9,	**2.11.11**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**Persentase Timbulan Sampah yang Terkelola**	**-**	**62 %**	**55.037.960.200,00**	**131.277.067.189,00**	**132.870.762.099,00**	**5.932.258.372,00**
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	*Persentase Pengelolaan Sampah*	-	62 %	55.037.960.200,00	131.277.067.189,00	132.870.762.099,00	77.832.801.899,00
	2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan							
			Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	50 Kelompok	50 Kelompok	491.400.000,00	1.028.890.000,00	1.008.256.000,00	516.856.000,00
	2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota							
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	50 Unit	50 Unit	2.712.800.000,00	65.996.186.441,00	66.493.314.441,00	63.780.514.441,00
	2.11.11.2.01.0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan							
			Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	1514062 Ton	525000 Ton	5.902.495.300,00	7.596.750.000,00	7.582.150.000,00	1.679.654.700,00
	2.11.11.2.01.0013	Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah							
			Jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali	302812 Ton	302812 Ton	17.922.500.000,00	30.167.122.022,00	31.320.792.932,00	13.398.292.932,00
		UPTD PENGELOLAAN SAMPAH WILAYAH I				**143.118.430.150,00**	**230.564.007.766,00**	**235.897.063.343,00**	**92.778.633.193,00**

	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**143.118.430.150,00**	**230.564.007.766,00**	**235.897.063.343,00**	**92.778.633.193,00**
	2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**				**143.118.430.150,00**	**230.564.007.766,00**	**235.897.063.343,00**	**92.778.633.193,00**
1,	**2.11.11**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**Persentase Timbulan Sampah yang Terkelola**	-	**62 %**	**55.037.960.200,00**	**131.277.067.189,00**	**132.870.762.099,00**	**5.932.258.372,00**
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	*Persentase Pengelolaan Sampah*	62 %	62 %	55.037.960.200,00	131.277.067.189,00	132.870.762.099,00	77.832.801.899,00
	2.11.11.2.01.0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan							
			Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	24859 Ton	24859 Ton	1.093.103.600,00	1.062.304.992,00	1.059.874.992,00	-33.228.608,00
		UPTD PENGELOLAAN SAMPAH WILAYAH II				**143.118.430.150,00**	**230.564.007.766,00**	**235.897.063.343,00**	**92.778.633.193,00**
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**143.118.430.150,00**	**230.564.007.766,00**	**235.897.063.343,00**	**92.778.633.193,00**
	2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**				**143.118.430.150,00**	**230.564.007.766,00**	**235.897.063.343,00**	**92.778.633.193,00**
1,	**2.11.11**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**Persentase Timbulan Sampah yang Terkelola**	**62 %**	**62 %**	**55.037.960.200,00**	**131.277.067.189,00**	**132.870.762.099,00**	**5.932.258.372,00**
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	*Persentase Pengelolaan Sampah*	62 %	62 %	55.037.960.200,00	131.277.067.189,00	132.870.762.099,00	77.832.801.899,00
	2.11.11.2.01.0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan							

			Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	24859 Ton	24859 Ton	1.219.094.300,00	1.198.800.000,00	1.196.370.000,00	-22.724.300,00
		UPTD PENGELOLAAN SAMPAH WILAYAH III				**143.118.430.150,00**	**230.564.007.766,00**	**235.897.063.343,00**	**92.778.633.193,00**
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**143.118.430.150,00**	**230.564.007.766,00**	**235.897.063.343,00**	**92.778.633.193,00**
	2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**				**143.118.430.150,00**	**230.564.007.766,00**	**235.897.063.343,00**	**92.778.633.193,00**
1,	**2.11.11**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**Persentase Timbulan Sampah yang Terkelola**	**62 %**	**62 %**	**55.037.960.200,00**	**131.277.067.189,00**	**132.870.762.099,00**	**5.932.258.372,00**
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	*Persentase Pengelolaan Sampah*	62 %	62 %	55.037.960.200,00	131.277.067.189,00	132.870.762.099,00	77.832.801.899,00
	2.11.11.2.01.0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan							
			Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	25419 Ton	25419 Ton	1.275.099.900,00	1.220.466.000,00	1.218.036.000,00	-57.063.900,00
		UPTD PENGELOLAAN SAMPAH WILAYAH IV				**143.118.430.150,00**	**230.564.007.766,00**	**235.897.063.343,00**	**92.778.633.193,00**
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**143.118.430.150,00**	**230.564.007.766,00**	**235.897.063.343,00**	**92.778.633.193,00**
	2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**				**143.118.430.150,00**	**230.564.007.766,00**	**235.897.063.343,00**	**92.778.633.193,00**
1,	**2.11.11**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**Persentase Timbulan Sampah yang Terkelola**	-	**62 %**	**55.037.960.200,00**	**131.277.067.189,00**	**132.870.762.099,00**	**5.932.258.372,00**

	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	*Persentase Pengelolaan Sampah*	-	62 %	55.037.960.200,00	131.277.067.189,00	132.870.762.099,00	77.832.801.899,00
	2.11.11.2.01.0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan							
			Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	27891,2 Ton	27891 Ton	1.570.856.000,00	1.167.210.000,00	1.164.780.000,00	-406.076.000,00
		UPTD PENGELOLAAN SAMPAH WILAYAH V				**143.118.430.150,00**	**230.564.007.766,00**	**235.897.063.343,00**	**92.778.633.193,00**
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**143.118.430.150,00**	**230.564.007.766,00**	**235.897.063.343,00**	**92.778.633.193,00**
	2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**				**143.118.430.150,00**	**230.564.007.766,00**	**235.897.063.343,00**	**92.778.633.193,00**
1,	**2.11.11**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**Persentase Timbulan Sampah yang Terkelola**	**62 %**	**62 %**	**55.037.960.200,00**	**131.277.067.189,00**	**132.870.762.099,00**	**5.932.258.372,00**
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	*Persentase Pengelolaan Sampah*	62 %	62 %	55.037.960.200,00	131.277.067.189,00	132.870.762.099,00	77.832.801.899,00
	2.11.11.2.01.0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan							
			Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	23536 Ton	23184 Ton	1.248.104.200,00	978.744.000,00	976.314.000,00	-271.790.200,00
		UPTD PENGELOLAAN SAMPAH WILAYAH VI				**143.118.430.150,00**	**230.564.007.766,00**	**235.897.063.343,00**	**92.778.633.193,00**
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**143.118.430.150,00**	**230.564.007.766,00**	**235.897.063.343,00**	**92.778.633.193,00**

	2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**				**143.118.430.150,00**	**230.564.007.766,00**	**235.897.063.343,00**	**92.778.633.193,00**
1,	**2.11.11**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**Persentase Timbulan Sampah yang Terkelola**	**62 %**	**62 %**	**55.037.960.200,00**	**131.277.067.189,00**	**132.870.762.099,00**	**5.932.258.372,00**
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	*Persentase Pengelolaan Sampah*	62 %	62 %	55.037.960.200,00	131.277.067.189,00	132.870.762.099,00	77.832.801.899,00
	2.11.11.2.01.0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan							
			Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	22414 Ton	22414 Ton	1.375.102.600,00	1.431.196.992,00	1.428.766.992,00	53.664.392,00
		UPTD PENGELOLAAN SAMPAH WILAYAH VII				**143.118.430.150,00**	**230.564.007.766,00**	**235.897.063.343,00**	**92.778.633.193,00**
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**143.118.430.150,00**	**230.564.007.766,00**	**235.897.063.343,00**	**92.778.633.193,00**
	2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**				**143.118.430.150,00**	**230.564.007.766,00**	**235.897.063.343,00**	**92.778.633.193,00**
1,	**2.11.11**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**Persentase Timbulan Sampah yang Terkelola**	**-**	**62 %**	**55.037.960.200,00**	**131.277.067.189,00**	**132.870.762.099,00**	**5.932.258.372,00**
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	*Persentase Pengelolaan Sampah*	-	62 %	55.037.960.200,00	131.277.067.189,00	132.870.762.099,00	77.832.801.899,00
	2.11.11.2.01.0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan							
			Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	21668 Ton	21668 Ton	1.035.105.100,00	1.090.692.000,00	1.088.262.000,00	53.156.900,00
		UPTD PENGELOLAAN SAMPAH WILAYAH VIII				**143.118.430.150,00**	**230.564.007.766,00**	**235.897.063.343,00**	**92.778.633.193,00**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**143.118.430.150,00**	**230.564.007.766,00**	**235.897.063.343,00**	**92.778.633.193,00**
	2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**				**143.118.430.150,00**	**230.564.007.766,00**	**235.897.063.343,00**	**92.778.633.193,00**
1,	**2.11.11**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**Persentase Timbulan Sampah yang Terkelola**	**62 %**	**62 %**	**55.037.960.200,00**	**131.277.067.189,00**	**132.870.762.099,00**	**5.932.258.372,00**
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	*Persentase Pengelolaan Sampah*	62 %	62 %	55.037.960.200,00	131.277.067.189,00	132.870.762.099,00	77.832.801.899,00
	2.11.11.2.01.0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan							
			Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	26591 Ton	23424 Ton	1.178.104.500,00	1.201.980.000,00	1.199.550.000,00	21.445.500,00
		UPTD PENGELOLAAN SAMPAH WILAYAH IX				**143.118.430.150,00**	**230.564.007.766,00**	**235.897.063.343,00**	**92.778.633.193,00**
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**143.118.430.150,00**	**230.564.007.766,00**	**235.897.063.343,00**	**92.778.633.193,00**
	2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**				**143.118.430.150,00**	**230.564.007.766,00**	**235.897.063.343,00**	**92.778.633.193,00**

1,	**2.11.11**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**Persentase Timbulan Sampah yang Terkelola**	**62 %**	**62 %**	**55.037.960.200,00**	**131.277.067.189,00**	**132.870.762.099,00**	**5.932.258.372,00**
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	*Persentase Pengelolaan Sampah*	62 %	62 %	55.037.960.200,00	131.277.067.189,00	132.870.762.099,00	77.832.801.899,00
	2.11.11.2.01.0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan							
			Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	29062 Ton	29062 Ton	1.159.102.900,00	1.046.304.000,00	1.043.874.000,00	-115.228.900,00
		UPTD PENGELOLAAN TEMPAT PEMROSESAN AKHIR				**143.118.430.150,00**	**230.564.007.766,00**	**235.897.063.343,00**	**92.778.633.193,00**
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**143.118.430.150,00**	**230.564.007.766,00**	**235.897.063.343,00**	**92.778.633.193,00**
	2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**				**143.118.430.150,00**	**230.564.007.766,00**	**235.897.063.343,00**	**92.778.633.193,00**
1,	**2.11.11**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**Persentase Timbulan Sampah yang Terkelola**	**62 %**	**62 %**	**55.037.960.200,00**	**131.277.067.189,00**	**132.870.762.099,00**	**5.932.258.372,00**
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	*Persentase Pengelolaan Sampah*	62 %	62 %	55.037.960.200,00	131.277.067.189,00	132.870.762.099,00	77.832.801.899,00
	2.11.11.2.01.0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional							
			jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	985020 Ton	985020 Ton	7.608.100.800,00	6.785.200.992,00	6.785.200.992,00	-822.899.808,00
		UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN				**143.118.430.150,00**	**230.564.007.766,00**	**235.897.063.343,00**	**92.778.633.193,00**

	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**143.118.430.150,00**	**230.564.007.766,00**	**235.897.063.343,00**	**92.778.633.193,00**
	2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**				**143.118.430.150,00**	**230.564.007.766,00**	**235.897.063.343,00**	**92.778.633.193,00**
1,	**2.11.03**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase Peningkatan Kualitas Lingkungan Udara, Air dan Tanah**	**-**	**1,5 Persen**	**4.095.140.000,00**	**3.993.172.848,00**	**3.783.588.448,00**	**2.054.860.000,00**
	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	*Meningkatnya IKA*	72 Nilai	72 Nilai	4.095.140.000,00	3.993.172.848,00	3.783.588.448,00	-311.551.552,00
	2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota							
			Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	1000 Dokumen	1000 Dokumen	1.932.140.000,00	2.282.414.328,00	2.260.415.928,00	328.275.928,00
		UPTD PERLENGKAPAN DAN PERBEKALAN				**143.118.430.150,00**	**230.564.007.766,00**	**235.897.063.343,00**	**92.778.633.193,00**
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**143.118.430.150,00**	**230.564.007.766,00**	**235.897.063.343,00**	**92.778.633.193,00**
	2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**				**143.118.430.150,00**	**230.564.007.766,00**	**235.897.063.343,00**	**92.778.633.193,00**
1,	**2.11.11**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**Persentase Timbulan Sampah yang Terkelola**	**62 %**	**62 %**	**55.037.960.200,00**	**131.277.067.189,00**	**132.870.762.099,00**	**5.932.258.372,00**

	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	*Persentase Pengelolaan Sampah*	62 %	62 %	55.037.960.200,00	131.277.067.189,00	132.870.762.099,00	77.832.801.899,00
	2.11.11.2.01.0009	Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah							
			Jumlah fasilitas penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	300 Unit	300 Unit	9.246.991.000,00	9.305.219.750,00	9.305.219.750,00	58.228.750,00
	J U M L A H					**143.118.430.150,00**	**230.564.007.766,00**	**235.897.063.343,00**	**1.284.717.462.164,00**

BAB IV
PENUTUP

Sesuai tugas pokok dan fungsinya sebagai OPD Pengelola Lingkungan hidup dan Kebersihan Daerah,Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya selalu berupaya untuk tetap mempertimbangkan kemampuan sumber daya yang ada dan berorientasi terhadap pemecahan masalah dengan memperhatikan aspirasi dan dinamika yang berkembang di masyarakat.

Rencana Kerja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Tangerang selain sebagai acuan pelaksanaan kegiatan tahun 2025 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan.Rencana Kerja Perubahan ini juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Tangerang Tahun 2025 ini,diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman bagi segenap aparat Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Tangerang dalam melaksanakan tugas sebagai pengendali dampak lingkungan hidup dan kebersihan dengan baik sehingga hasilnya dapat dinikmati oleh masyarakat.

20. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421). UU ini secara substansi mengamanahkan penyusunan Renja perubahan Perangkat Daerah untuk periode tahunan guna mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Perangkat Daerah. Berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Rencana Kerja Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi dan indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Dalam pelaksanaannya penyusunan Rencana Kerja diatur oleh Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan dengan menjaga kesinambungan dan konsistensi perencanaan pembangunan penyusunan RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2025 berpedoman pada arah kebijakan RPJPD Kabupaten Tangerang Tahun 2005- 2025, Rencana Pembangan Daerah Provinsi Banten Tahun 2022-2026, Rancangan RKP Tahun 2025 dan Ranwal RKPD Propinsi Banten Tahun 2025. Rencana pembangunan daerah Kabupaten Tangerang memasuki tahun kedua pembangunan tahunan dalam Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024- 2026.

RKPD memuat evaluasi pembangunan daerah, rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah maupun melibatkan partisipasi masyarakat, yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan bagi seluruh Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja).

Dalam melaksananakan tugas dan fungsinya secara teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 112 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang dalam penyusunan Renja Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050- 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Gubernur Banten Nomor 33 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah 2005-2025
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tangerang Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang;
16. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026;
17. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang;
18. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 20 tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2025
19. Surat Kementerian Dalam Negeri No. 600.5.4/48/SJ tentang Implementasi SIPD dan Hasil Bimbingan Teknis Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah pada Sub Sistem Informasi Pembangunan Daerah Dengan Domain SIPD.go.id Yang Terintegrasi Dengan SIPD-RI.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang Tahun 2025 adalah tersusunnya rencana kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang Tahun 2025 yang terurai secara tepat dan terarah pada Tingkat kebijakan, program dan kegiatan hingga indikator kinerja serta rencana dan anggaran yang berbasis regulasi, tupoksi dan evaluasi. Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang dimaksudkan untuk melakukan penyesuaian terhadap RKPD Kabupaten Tangerang dari hasil evaluasi tahun berjalan yang meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan kerangka ekonomi dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan pada RKPD 2025.

Adapun Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang untuk sinkronisasi penyelenggaraan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2025 serta untuk memberikan pedoman perencanaan pelaksanaan kegiatan Anggaran 2025 secara terarah dan terpadu sesuai dengan tugas dan fungsi serta permasalahan yang perlu segera ditangani.

1.4 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dokumen Rencana Kerja Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, Sistematika Penulisan;

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TANGERANG

Bab ini menyajikan tentang Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang sampai dengan Triwulan II tahun 2025 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat;

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TANGERANG

Bab ini menyajikan tentang evaluasi terhadap realisasi pendanaan rencana kerja tahun berjalan dan penjabaran perubahan rencana kerja dan pendanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang tahun berjalan.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menyajikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TAHUN LALU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TANGERANG

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang merupakan langkah awal yang harus dilaksanakan oleh instansi Pemerintah agar mampu menjawab tuntutan strategis lokal, nasional, global dan tetap berada dalam tatanan sistem Administrasi Negara Kesatuan RI. Dengan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi Pemerintah dapat menyelaraskan visi misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Pada Bab II ini akan dipaparkan tentang evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang Tahun sebelumnya sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 dan capaian Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang termuat pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang dan Pencapaian Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target, Realisasi, Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025 (Triwulan II)			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024		
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL											
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**											
2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**											
2.12.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan**	**%**	**100**	**100**	**100**	100	100	100	100	100	100
2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*Dokumen*	*5*	*2*	40	3	3	100	10	10	100
2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Dokumen*	*5*	*3*	60	7	7	100	7	7	100
2.12.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Laporan*	*1*	*1*	100	2	2	100	2	2	100
2.12.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Laporan*	*1*	*1*	100	1	1	100	1	1	100
2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah laporan keuangan*	*Tahun*	*1*		1	2	2	100	1	1	100
2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	*Orang/ Tahun*	*6*	*6*	100	12	12	100	12	12	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target, Realisasi, Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025 (Triwulan II)			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024		
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
2.12.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD											
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	*Laporan*	*1*	*1*	100	12	12	100	2	2	100
2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Pembinaan Pegawai*	*Dokumen*	*1*	*1*	100	1	1	100	1	1	100
2.12.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi											
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	*Orang*	*225*	*225*	100	12	12	100	260	260	100
2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*Dokumen*	*8*	*8*	100	8	8	100	8	8	100
2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	*Paket*	*1*	*1*	100	1	1	100	1	1	100
2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	*Paket*	*1*	*1*	100	1	1	100	1	1	100
2.12.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga											
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	*Paket*	*1*	*1*	100	5	5	100	1	1	100
2.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor											
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	*Paket*	*2*	*2*	100	8	8	100	1	1	100
2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan											
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	*Paket*	*10*	*10*	100	10	10	100	1	1	100
2.12.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan											
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	*Dokumen*	*3*	*3*	100	3	3	100	1	1	100
2.12.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu											

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target, Realisasi, Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025 (Triwulan II)			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024		
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Laporan*	*6*	*6*	100	12	12	100	12	12	100
2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Laporan*	*6*	*6*	100	12	12	100	12	12	100
2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia*	*Dokumen*	*1*	*1*	100	3	3	100	1	1	100
2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	*Laporan*	-	-	-	12	12	100	-	-	-
2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	*Laporan*	*1*	*1*	100	12	12	100	1	1	100
2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Dokumen*	*2*	*2*	100	2	2	100	3	3	100
2.12.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	*Unit*	*19*	*12*	63,16	19	14	73,68	19	19	100
2.12.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	*Unit*	*50*	*50*	100	66	66	100	52	49	94,23
2.12.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	*Unit*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.12.02	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	**Cakupan SKPWNI dan SKDWNI yang diterbitkan Cakupan kepemilikan KIA Cakupan Perekaman KTP-el**	%	100 100 65 99,5	100 100 61,12 100	100 100 94,03 100,50	100 100 50 99,40	100 100 50,73 99,87	100 100 101,46 100,47	100 100 60 99	100 100 60,66 100	100 100 101,10 101,01
2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	*Jumlah Dokumen Pelayanan Pendaftaran Penduduk*	*Dokumen*	*9*	*9*	100	9	9	100	9	9	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target, Realisasi, Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025 (Triwulan II)			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024		
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
2.12.02.2.01.0001	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan											
		Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	*Dokumen*	8.250	4.350	52,73	16.000	14.515	90,72	16.500	16.500	100
2.12.02.2.01.0003	Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk											
		Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Pelayanan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	*Orang/ Tahun*	*80*	-	-	-	-	-	181	181	100
2.12.02.2.01.0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk											
		Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	*Laporan*	1	1	100	-	-	-	1	1	100
2.12.02.2.01.0006	Pencatatan Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan											
		Jumlah Laporan Pencatatan Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	*Laporan*	*6*	*6*	100	-	-	-	2.000.000	1.487.634	74,38
2.12.02.2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk	*Jumlah Blanko KIA yang tersedia*	*Dokumen*	-	-	-	55.794	55.794	100	55.794	55.794	100
2.12.02.2.02.0002	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan											
		Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	*Dokumen*	-	-	-	55.794	55.794	100	55.794	55.794	100
2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	*Jumlah Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan*	*Dokumen*	*4*	*3*	75				5	5	100
2.12.02.2.03.0004	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk											
		Jumlah Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk yang Dimanfaatkan	*Dokumen*	*4*	*3*	75	6	6	100	5	5	100
2.12.03	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**Cakupan Kepemilikan Akte Kematian** **Cakupan Kepemilikan Akte Kelahiran**	%	100 96,38	100 92,36	100 95,83	100 98	100 93,13	100 95,03	100 99	100 92,75	100 93,69
2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	*Jumlah Laporan Pelayanan Pencatatan Sipil*	*Dokumen*	*5*	*5*	100	5	5	100	5	5	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target, Realisasi, Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025 (Triwulan II)			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024		
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
2.12.03.2.01.0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting											
		Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	*Dokumen*	*5*	5	100	5	5	100	5	5	100
2.12.04	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	**Persentase Jaringan SIAK dalam Kondisi Baik**	**%**	100	-	-	100	100	100	100	100	100
2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	*Persentase Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan*	*Dokumen*	-	-	-	14	14	100	13	13	100
2.12.04.2.01.0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan											
		Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	*Dokumen*	*81,35*	-	72,88	14	14	100	13	13	100
2.12.04.2.02	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	*Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan*	*Dokumen*	*1*	*1*	100	-	-	-	-	-	-
2.12.04.2.02.0001	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan											
		Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun	*Dokumen*	*1*	*1*	100	-	-	-	-	-	-
2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	*Terlaksananya Aktivasi Indentitas Kependudukan Digital (IKD)*	*Laporan*	*1*	*1*	100	2	2	100	2	2	100
2.12.04.2.03.0003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan											
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	*Laporan*	*1*	*0,25*	25	1	1	100	1	1	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target, Realisasi, Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025 (Triwulan II)			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024		
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
2.12.04.2.03.0005	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan											
		Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	*Laporan*	*1*	-	-	-	-	-	1	1	100
2.12.04.2.03.0007	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat											
		Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	*Laporan*	*1*	-	-	-	-	-	-	-	-
2.12.04.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	*Meningkatnya Pengetahuan dan Pemahaman Pengelola SIAK Kecamatan dan Dinas terhadap Aplikasi dan Peraturan terbaru tentang SIAK*	*Laporan*	*2*	-	-	2	2	100	2	2	100
2.12.04.2.04.0001	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan											
		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	*Laporan*	*2*	*1*	50	4	4	100	1	1	100
2.12.04.2.04.0003	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan											
		Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	*Laporan*	*2*	*1*	50	1	1	100	1	1	100
2.12.05	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	**Persentase Pemenuhan Pengelolaan Profil Kependudukan**	**%**	1	1	100	100	100	100	100	100	100
2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	*Jumlah Dokumen Data Profil Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang*	*Dokumen*	*1*	*1*	100	1	1	100	1	1	100
2.12.05.2.01.0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain											
		Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	*Dokumen*	*1*	*1*	100	1	1	100	1	1	100

Berdasarkan Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang dan Pencapaian Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang yang tercantum pada tabel 2.1 berikut penjabaran terkait analisa permasalahan/faktor kegagalan dan keberhasilan dan solusi sebagai berikut:

Permasalahan/Faktor Kegagalan dan Keberhasilan dan Solusi:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan capaian 100% sampai dengan Triwulan II, yang berarti bahwa sudah mencapai target yang ditentukan, faktor keberhasilan ini karena kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang direncanakan. Solusi agar capaian sesuai dengan target yakni kegiatan dilaksanakan sesuai dengan jadwal.
2. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan capaian 40% sampai dengan Triwulan II, hal ini disebabkan oleh beberapa kegiatan yang digeser pada Triwulan III sehingga capaian belum mencapai 100%. Solusi agar capaian sesuai dengan target yakni kegiatan dilaksanakan sesuai dengan jadwal.
3. Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan capaian 60% sampai dengan Triwulan II, hal ini disebabkan oleh beberapa kegiatan yang digeser pada Triwulan III sehingga capaian belum mencapai 100%. Solusi agar capaian sesuai dengan target yakni kegiatan dilaksanakan sesuai dengan jadwal.
4. Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan capaian 100% sampai dengan Triwulan II, yang berarti bahwa sudah mencapai target yang ditentukan, faktor keberhasilan ini karena kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang direncanakan. Solusi agar capaian sesuai dengan target yakni kegiatan dilaksanakan sesuai dengan jadwal.
5. Sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan capaian 100% sampai dengan Triwulan II, yang berarti bahwa sudah mencapai target yang ditentukan, faktor keberhasilan ini karena kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang direncanakan. Solusi agar capaian sesuai dengan target yakni kegiatan dilaksanakan sesuai dengan jadwal.
6. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan capaian 100% sampai dengan Triwulan II, yang berarti bahwa sudah mencapai target yang ditentukan, faktor keberhasilan ini karena kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang direncanakan. Solusi agar capaian sesuai dengan target yakni kegiatan dilaksanakan sesuai dengan jadwal.
7. Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan capaian 100% sampai dengan Triwulan II, yang berarti bahwa sudah mencapai target yang ditentukan, faktor keberhasilan ini karena kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang direncanakan. Solusi agar capaian sesuai dengan target yakni kegiatan dilaksanakan sesuai dengan jadwal.
8. Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dengan capaian 100% sampai dengan Triwulan II, yang berarti bahwa sudah mencapai target yang ditentukan, faktor keberhasilan ini karena kegiatan

telah dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang direncanakan. Solusi agar capaian sesuai dengan target yakni kegiatan dilaksanakan sesuai dengan jadwal.

9. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan capaian 100% sampai dengan Triwulan II, yang berarti bahwa sudah mencapai target yang ditentukan, faktor keberhasilan ini karena kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang direncanakan. Solusi agar capaian sesuai dengan target yakni kegiatan dilaksanakan sesuai dengan jadwal.
10. Sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dengan capaian 100% sampai dengan Triwulan II, yang berarti bahwa sudah mencapai target yang ditentukan, faktor keberhasilan ini karena kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang direncanakan. Solusi agar capaian sesuai dengan target yakni kegiatan dilaksanakan sesuai dengan jadwal.
11. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan capaian 100% sampai dengan Triwulan II, salah satu faktor keberhasilan ini karena kegiatan ini direalisasikan sesuai dengan paket belanja dan jadwal yang telah ditentukan. Solusi agar capaian sesuai dengan target yakni kegiatan dilaksanakan sesuai dengan jadwal.
12. Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan capaian 100% sampai dengan Triwulan II, salah satu faktor keberhasilan ini karena kegiatan ini direalisasikan sesuai dengan paket belanja dan jadwal yang telah ditentukan. Solusi agar capaian sesuai dengan target yakni kegiatan dilaksanakan sesuai dengan jadwal.
13. Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan capaian 100% sampai dengan Triwulan II, salah satu faktor keberhasilan ini karena kegiatan ini direalisasikan sesuai dengan paket belanja dan jadwal yang telah ditentukan. Solusi agar capaian sesuai dengan target yakni kegiatan dilaksanakan sesuai dengan jadwal.
14. Sub kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan capaian 100% sampai dengan Triwulan II, salah satu faktor keberhasilan ini karena kegiatan ini direalisasikan sesuai dengan paket belanja dan jadwal yang telah ditentukan. Solusi agar capaian sesuai dengan target yakni kegiatan dilaksanakan sesuai dengan jadwal.
15. Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan capaian 100% sampai dengan Triwulan II, salah satu faktor keberhasilan ini karena kegiatan ini direalisasikan sesuai dengan paket belanja dan jadwal yang telah ditentukan. Solusi agar capaian sesuai dengan target yakni kegiatan dilaksanakan sesuai dengan jadwal.
16. Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan capaian 100% sampai dengan Triwulan II, salah satu faktor keberhasilan ini karena kegiatan ini direalisasikan sesuai dengan paket belanja dan jadwal yang telah ditentukan. Solusi agar capaian sesuai dengan target yakni kegiatan dilaksanakan sesuai dengan jadwal.
17. Sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan capaian 100% sampai dengan Triwulan II, salah satu faktor keberhasilan ini karena kegiatan ini direalisasikan sesuai dengan paket belanja dan jadwal yang telah ditentukan. Solusi agar capaian sesuai dengan target yakni kegiatan dilaksanakan sesuai dengan jadwal.

18. Sub kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu dengan capaian 100% sampai dengan Triwulan II, salah satu faktor keberhasilan ini karena kegiatan ini direalisasikan sesuai dengan paket belanja dan jadwal yang telah ditentukan. Solusi agar capaian sesuai dengan target yakni kegiatan dilaksanakan sesuai dengan jadwal.
19. Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan capaian 100% sampai dengan Triwulan II, salah satu faktor keberhasilan ini karena kegiatan ini direalisasikan sesuai dengan paket belanja dan jadwal yang telah ditentukan. Solusi agar capaian sesuai dengan target yakni kegiatan dilaksanakan sesuai dengan jadwal.
20. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan capaian 100% sampai dengan Triwulan II, salah satu faktor keberhasilan ini karena kegiatan direalisasikan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Solusi agar capaian sesuai dengan target yakni kegiatan dilaksanakan sesuai dengan jadwal.
21. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan capaian 100% sampai dengan Triwulan II, salah satu faktor keberhasilan ini karena kegiatan direalisasikan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Solusi agar capaian sesuai dengan target yakni kegiatan dilaksanakan sesuai dengan jadwal.
22. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan capaian 100% sampai dengan Triwulan II, salah satu faktor keberhasilan ini karena kegiatan direalisasikan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Solusi agar capaian sesuai dengan target yakni kegiatan dilaksanakan sesuai dengan jadwal.
23. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan capaian 63,16% sampai dengan Triwulan II, salah satu permasalahan yang menyebabkan kegiatan ini belum mencapai 100% karena beberapa kendaraan waktu pelaksanaan Pajak kendarannya di lakukan di Triwulan III dan IV. Solusi agar capaian sesuai dengan target yakni kegiatan dilaksanakan sesuai dengan jadwal.
24. Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan capaian 66% sampai dengan Triwulan II, salah satu faktor penyebab belum mencapai 100% karena kegiatan direalisasikan pada triwulan berikutnya. Solusi agar capaian sesuai dengan target yakni kegiatan dilaksanakan sesuai dengan jadwal.
25. Program Pendaftaran Penduduk dengan indikator Cakupan SKPWNI dan SKDWNI yang diterbitkan dengan capaian masing-masing sebesar 100% hal ini disebabkan oleh kegiatan direalisasikan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Sedangkan untuk indikator Cakupan kepemilikan KIA memperoleh capaian 94,03% belum mencapai target 100% karena masih dalam proses pencapaian target sampai dengan Triwulan IV, kemudian untuk indikator Cakupan Perekaman sudah melebihi target yakni sebesar 100,50%, salah satu faktor keberhasilan capaian ini disebabkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah melakukan kegiatan jemput bola dan perekaman KTP di lokus Kecamatan, sehingga sampai dengan Triwulan II mampu melebihi target yang telah ditentukan. Solusi agar semua indikator capaian sesuai dengan target yakni kegiatan dilaksanakan sesuai dengan jadwal

dan pelayanan dilakukan di Kecamatan agar masyarakat mudah dan cepat dalam melakukan proses administrasi kependudukan.

26. Sub kegiatan Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan dengan capaian 52,73% sampai dengan Triwulan II, faktor penyebab capaian belum mencapai 100% karena belum mendapat update capaian dari bidang sampai dengan Triwulan II. Solusi agar capaian sesuai dengan target yakni kegiatan dilaksanakan sesuai dengan jadwal.
27. Sub kegiatan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk dengan capaian 0% sampai dengan Triwulan II, faktor penyebab capaian belum mencapai 100% karena belum mendapat update capaian dari bidang sampai dengan Triwulan II. Solusi agar capaian sesuai dengan target yakni kegiatan dilaksanakan sesuai dengan jadwal.
28. Sub kegiatan Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dengan capaian 100%, salah satu faktor keberhasilan ini karena kegiatan direalisasikan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Solusi agar capaian sesuai dengan target yakni kegiatan dilaksanakan sesuai dengan jadwal.
29. Sub kegiatan Pencatatan Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan dengan capaian 100%, salah satu faktor keberhasilan ini karena kegiatan direalisasikan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Solusi agar capaian sesuai dengan target yakni kegiatan dilaksanakan sesuai dengan jadwal.
30. Kegiatan Penataan Pendaftaran Penduduk dengan capaian 0% sampai dengan Triwulan II, hal ini disebabkan oleh belum mendapat update capaian dari bidang. Solusi agar dapat mencapai target yaitu kegiatan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditentukan.
31. Sub kegiatan Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan dengan capaian 0% sampai dengan Triwulan II, faktor penyebab capaian belum mencapai 100% karena kegiatan dilaksanakan pada Triwulan III. Solusi agar capaian sesuai dengan target yakni kegiatan dilaksanakan sesuai dengan jadwal.
32. Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dengan capaian 75% sampai dengan Triwulan II, faktor penyebab capaian belum mencapai 100% karena kegiatan di laksanakan pada Triwulan berikutnya. Solusi agar capaian sesuai dengan target yakni kegiatan dilaksanakan sesuai dengan jadwal.
33. Sub kegiatan Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk dengan capaian 70% sampai dengan Triwulan II, faktor penyebab capaian belum mencapai 100% karena kegiatan di laksanakan pada Triwulan berikutnya. Solusi agar capaian sesuai dengan target yakni kegiatan dilaksanakan sesuai dengan jadwal.
34. Program Pencatatan Sipil dengan indikator Cakupan Kepemilikan Akte Kematian dengan capaian 100% sampai dengan Triwulan II, faktor keberhasilan capaian ini diperoleh karena Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan pelayanan kepada masyarakat dengan baik, sehingga pengajuan dari masyarakat langsung di proses sehingga mampu mencapai target. Kemudian untuk capaian indikator Cakupan Kepemilikan Akte Kelahiran dengan capaian 95,83% sampai dengan Triwulan II, faktor penyebab ketidak capaian disebabkan oleh penduduk yang datang

ke Kabupaten Tangerang selalu bertambah sehingga pembagi pada rumus capaian Akte semakin bertambah. Solusi agar mampu mencapai target yakni dengan melakukan percepatan pelayanan atau jemput bola pelayanan ke rumah penduduk.

35. Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil dengan capaian 100% sampai dengan Triwulan II, faktor keberhasilan ini disebabkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah melakukan pelayanan ke lokus kecamatan sehingga mampu meraih target. Solusi agar capaian melampaui target yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan pelayanan di lokus kecamatan dan giat posyandu agar mampu mencapai target.
36. Sub kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting dengan capaian 100% sampai dengan Triwulan II, faktor penyebab keberhasilan ini karena kegiatan telah dilaksanakan sesuai jadwal dan target yang telah ditentukan. Solusi agar capaian sesuai dengan target yakni kegiatan dilaksanakan sesuai dengan jadwal.
37. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dengan capaian 0% sampai dengan Triwulan II, faktor penyebab kegagalan disebabkan oleh belum mendapat update capaian dari bidang. Solusi agar mencapai target yaitu kegiatan dilaksanakan sesuai dengan jadwal.
38. Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan dengan capaian 0% sampai dengan Triwulan II, faktor penyebab kegagalan disebabkan oleh belum mendapat update capaian dari bidang. Solusi agar mencapai target yaitu kegiatan dilaksanakan sesuai dengan jadwal.
39. Sub kegiatan Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan dengan progress capaian sampai dengan Triwulan II sebesar 72,88% dari target 81,35%, faktor penyebab belum tercapai target disebabkan oleh persetujuan dari Ditjen Kemendagri yang belum turun sehingga perhitungan progress capaian menggunakan metode prosentase yang akan diakumulasikan pada akhir tahun. Solusi agar capaian sesuai dengan target yakni penentuan target di letakkan pada akhir Triwulan agar target dapat tercapai.
40. Kegiatan Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dengan capaian sebesar 100% sampai dengan Triwulan II. Faktor keberhasilan capaian ini karena kegiatan telah dilaksanakan sesuai jadwal dan target yang telah ditentukan. Solusi agar capaian sesuai dengan target yakni kegiatan dilaksanakan sesuai dengan jadwal.
41. Sub kegiatan Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dengan capaian sebesar 100% sampai dengan Triwulan II. Faktor keberhasilan capaian ini karena kegiatan telah dilaksanakan sesuai jadwal dan target yang telah ditentukan. Solusi agar capaian sesuai dengan target yakni kegiatan dilaksanakan sesuai dengan jadwal.
42. Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dengan capaian sebesar 100% sampai dengan Triwulan II. Faktor keberhasilan capaian ini karena kegiatan telah dilaksanakan sesuai jadwal dan target yang telah ditentukan.

Solusi agar capaian sesuai dengan target yakni kegiatan dilaksanakan sesuai dengan jadwal.

43. Sub kegiatan Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dengan capaian sebesar 25% sampai dengan Triwulan II. Faktor penyebab belum mencapai 100% karena kegiatan dilaksanakan pada Triwulan berikutnya. Solusi agar capaian sesuai dengan target yakni kegiatan dilaksanakan sesuai dengan jadwal.
44. Sub kegiatan Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dengan capaian sebesar 0% sampai dengan Triwulan II. Faktor penyebab belum mencapai 100% karena kegiatan dilaksanakan pada Triwulan berikutnya. Solusi agar capaian sesuai dengan target yakni kegiatan dilaksanakan sesuai dengan jadwal.
45. Sub kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat dengan capaian sebesar 0% sampai dengan Triwulan II. Faktor penyebab belum mencapai 100% karena kegiatan dilaksanakan pada Triwulan berikutnya. Solusi agar capaian sesuai dengan target yakni kegiatan dilaksanakan sesuai dengan jadwal.
46. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dengan capaian 0% sampai dengan Triwulan II, faktor penyebab kegagalan disebabkan oleh belum mendapat update capaian dari bidang. Solusi agar mencapai target yaitu kegiatan dilaksanakan sesuai dengan jadwal.
47. Sub kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dengan capaian sebesar 0% sampai dengan Triwulan II, faktor penyebab kegagalan disebabkan oleh belum mendapat update capaian dari bidang. Solusi agar mencapai target yaitu kegiatan dilaksanakan sesuai dengan jadwal.
48. Sub kegiatan Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan dengan capaian sebesar 0% sampai dengan Triwulan II, faktor penyebab kegagalan disebabkan oleh belum mendapat update capaian dari bidang. Solusi agar mencapai target yaitu kegiatan dilaksanakan sesuai dengan jadwal.
49. Program Pengelolaan Profil Kependudukan dengan capaian 100% sampai dengan Triwulan II, faktor keberhasilan ini disebabkan oleh kegiatan dilaksanakan sesuai dengan jadwal. Solusi agar capaian sesuai target yakni kegiatan dilakukan sesuai jadwal.
50. Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan dengan capaian sebesar 100% sampai dengan Triwulan II. Faktor keberhasilan capaian ini karena kegiatan telah dilaksanakan sesuai jadwal dan target yang telah ditentukan. Solusi agar capaian sesuai dengan target yakni kegiatan dilaksanakan sesuai dengan jadwal.
51. Sub kegiatan Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain dengan capaian sebesar 100% sampai dengan Triwulan II. Faktor keberhasilan capaian ini karena kegiatan telah dilaksanakan sesuai jadwal dan target yang telah ditentukan. Solusi agar capaian sesuai dengan target yakni kegiatan dilaksanakan sesuai dengan jadwal.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, dengan organisasi sebagai berikut:

a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat:
   - Sub Bagian Keuangan;
   - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
   - Kelompok Jabatan Fungsional.
c. Bidang Pelayanan dan Pendaftaran Penduduk:
   - Kelompok Jabatan Fungsional.
d. Bidang Pencatatan Sipil:
   - Kelompok Jabatan Fungsional.
e. Bidang Pengelola Informasi, Administrasi Kependudukan;
   - Kelompok Jabatan Fungsional.
f. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan;
   - Kelompok Jabatan Fungsional.

Berikut struktur organisasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 10 Tahun 2023

Gambar 2.1
Struktur Organisasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 10 Tahun 2023

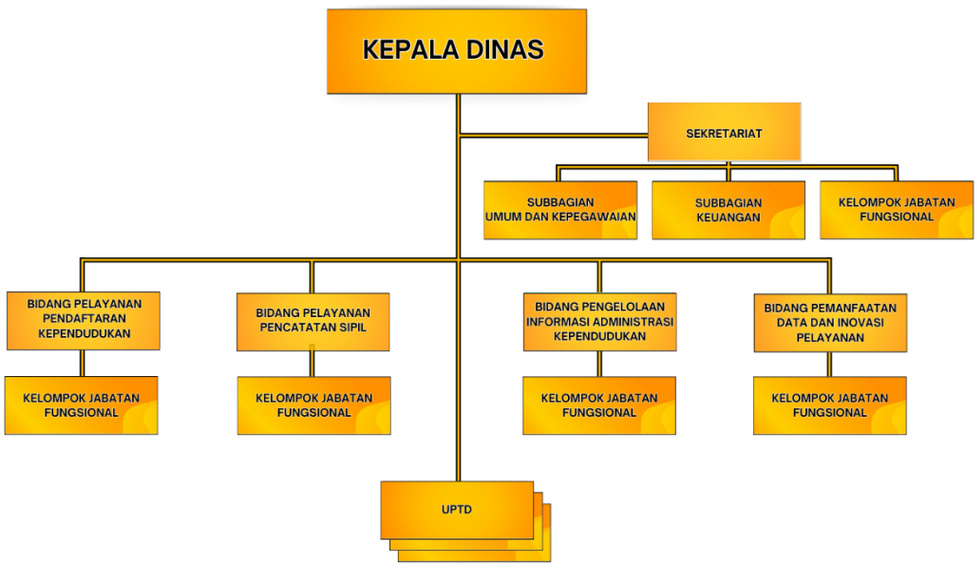

Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang telah disahkan oleh DPR-RI pada tanggal 26 November 2013 merupakan perubahan yang mendasar di bidang administrasi kependudukan. Tujuan utama perubahan Undang-Undang dimaksud adalah untuk meningkatkan efektivitas pelayanan Administrasi Kependudukan kepada masyarakat, menjamin akurasi data kependudukan dan ketunggalan Nomor Induk Kependudukan (NIK) serta ketunggalan dokumen kependudukan. Selain itu dengan disusul lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana lampirannya tentang Pembagian Urusan Pemerintahan konkruen Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, disebutkan bahwa Urusan Pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk Kabupaten/Kota yang harus dilaksanakan yaitu :

- Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
- Pelayanan Pencatatan Sipil;
- Pengumpulan data kependudukan sekaligus pemanfaatan dan penyajian database kependudukan kabupaten/kota; dan
- Penyusunan profil kependudukan Kabupaten/Kota.

Jenis-jenis pelayanan yang diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri dari:

1. Penerbitan biodata;
2. Penerbitan kartu keluarga;
3. Penerbitan Kartu Tanda penduduk elektronik (KTP-el);
4. Penerbitan kartu identitas anak (KIA);
5. Penerbitan Surat Keterangan Pindah;
6. Penerbitan Surat Keterangan Pindah Luar Negeri;
7. Penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal;
8. Penerbitan Surat Keterangan Lahir Mati;
9. Penerbitan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
10. Penerbitan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
11. Penerbitan Surat Keterangan Pengangkatan Anak;
12. Penerbitan Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia;
13. Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas;
14. Penerbitan Surat Keterangan Pencatatan Sipil;
15. Penerbitan Akta Kelahiran;
16. Penerbitan Akta Kematian;
17. Penerbitan Akta Perkawinan;
18. Penerbitan Akta Perceraian;
19. Penerbitan Akta Pengakuan Anak;
20. Penerbitan Akta Pengesahan Anak.

Jenis-jenis pelayanan inilah yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang dalam kapasitasnya sebagai institusi pelayananan publik khususnya bidang Administrasi Kependudukan (permohonan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil).

Tabel 2.2
Pencapaian Indikator Kinerja Kunci
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang

No	Indikator Kinerja Kunci Outcome	Satuan	Target Renstra			Tahun 2024	
			2024	2025	2026	Realisasi	Capaian
1.	Perekaman KTP Elektronik	Persen	99,45%	99,47%	99,49%	99,99%	100,54%

No	Indikator Kinerja Kunci Outcome	Satuan	Target Renstra			Tahun 2024	
			2024	2025	2026	Realisasi	Capaian
2.	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang memiliki KIA	Persen	60,00%	70,00%	80,00%	60,73%	101,22%
3.	Kepemilikan Akta Kelahiran	Persen	99,00%	99,50%	99,55%	92,76%	93,70%
4.	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	Persen	69,35%	85,48%	100,00%	72,88%	105,09%

Berdasarkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang berusaha untuk mencapai target pelayanan seperti pada Tabel 2.2 di atas. Pada Tabel 2.2 tersebut dapat dijelaskan bahwa rata-rata setiap tahun telah mencapai target kinerja pelayanan. Mengacu pada Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2024 – 2026.

Adapun capaian pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang Tahun 2025 (Update per Juni 2025) dapat dilihat pada Tabel 2.3 berikut ini:

Tabel 2.3
Capaian Indikator Tujuan dan Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang Tahun 2025
(Update Realisasi per Juni 2025)

No	Indikator Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Indeks Pelayanan Publik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Indeks	4,47	Proses Penilaian	Proses Penilaian
a	Cakupan Perekaman KTP-El	Persen	99,47%	99,72%	100,27%
b	Cakupan Kepemilikan KIA	Persen	70,00%	52,29%	87,15%
c	Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran 0 s/d 17 Tahun	Persen	99,50%	92,86%	93,80%
2.	Nilai AKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai	83,21 (Reviu Tahun 2023)	74,25	89,23

Dari tabel di atas capaian kinerja pelayanan per Juni 2025 untuk Indikator Tujuan dan Sasaran Indeks Pelayanan Publik tahun 2025 masih dalam proses penilaian oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi yang mana hasil penilaian Indeks Pelayanan Publik tahun 2022 sebesar 4,32, sedangkan Cakupan Perekaman KTP-El sebesar 99.72% (melebihi target), Cakupan Kepemilikan KIA sebesar 52.29% (kurang 7.71%), Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran 0 s/d 17 Tahun 92.86% (kurang 6.14%), kemudian untuk Nilai AKIP Disdukcapil sebesar 74,25 (kurang 8.96) yang berarti bahwa sebagian besar cakupan indikator tersebut belum mencapai target. Selain karena capaian tersebut bukan capaian final Tahun 2025, sehingga untuk mengejar kekurangan poin di masing-masing indikator, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berusaha untuk meningkatkan pelayanan agar indikator sasaran strategis dapat dicapai dengan maksimal.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan tugas dan fungsi serta kewenangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang, isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi dapat diturunkan sebagai berikut:

- Penyediaan aplikasi untuk setiap jenis pelayanan (pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengolahan/pemanfaatan data dan informasi) yang terintegrasi ke dalam satu sistem, yaitu SIAK.
- Pemutakhiran database (pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengolahan/pemanfaatan data dan informasi) melalui sistem/online.
- Mekanisme/pola penyimpanan arsip pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang dapat diakses melalui teknologi.
- Pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang mudah, murah, cepat, transparan dan dekat dengan masyarakat.
- Pengawasan dan pengendalian penegakan peraturan administrasi kependudukan dan pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- Peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait (penanggulangan kemiskinan, dll).
- Kajian, penelitian dan pengembangan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
- Untuk menunjang kelengkapan tertib administrasi pelaksanaan pelayanan masyarakat serta tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, wajib disiapkan: Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Dampak permasalahan yang dihadapi berpengaruh terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah dan capaian program unggulan serta pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang yang mendukung visi misi Pemerintah Kabupaten Tangerang. Dampak permasalahan yang dapat mempengaruhi arah kebijakan Pembangunan Kabupaten Tangerang seperti Tabel 2.4.

Tabel 2.4
Permasalahan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Isu Startegis
1	Kualitas Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pelayanan Pencatatan Sipil belum optimal	Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pelayanan Pencatatan Sipil masih terpusat di kantor Disdukcapil	Disdukcapil tidak memiliki pegawai yang bisa ditugaskan di Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Masih perlunya peningkatan pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dalam rangka mendukung perwujudan reformasi birokrasi.
2	Pemanfaatan data kependudukan oleh OPD maupun instansi layanan publik lainnya belum optimal	Terdapat OPD yang belum mengajukkan permohonan PKS Pemanfataan Data Kependudukan	OPD masih merasa belum memerlukan akses pemanfaatan data kependudukan	
3	Inovasi pada pelayanan pendaftaran penduduk dan pelayanan pencatatan sipil belum optimal	Inovasi hanya terbatas pada sebagian kecil dari seluruh proses pelayanan administrasi kependudukan	Aplikasi SIAK terpusat dari pusat yang merupakan mandatori Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil seluruh Indonesia	

- Tantangan dalam meningkatkan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang, antara lain:

Dinamika pembangunan daerah harus bergerak cepat yang diakibatkan oleh adanya perkembangan global diberbagai sektor kehidupan masyarakat yang tidak dapat dihindari, seiring dengan perkembangan global tersebut akan berdampak semakin mendesaknya kebutuhan pemanfaatan data kependudukan bagi berbagai kepentingan layanan publik, antara lain terkait dengan keimigrasian, perbankan, kepolisian dan perpajakan.

- Peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang, antara lain:
  a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan kewenangan penuh atas Pengumpulan data kependudukan sekaligus pemanfaatan dan penyajian database kependudukan kabupaten/kota, dan penyusunan profil kependudukan Kabupaten/Kota.
  b. Adanya pengembangan inovasi Implementasi Identitas Kependudukan Digital yang tengah diuji cobakan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang.
  c. Rencana Pembangunan Mal Pelayanan Publik.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat tiga hal yaitu:

1. Rancangan kerangka ekonomi daerah
2. Program prioritas pembangunan daerah
3. Rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju

Selanjutnya ketiga hal tersebut dipakai sebagai dasar penyusunan KUA- PPAS Rencana Kerja (Renja) SKPD Kabupaten Tangerang berdasarkan RKPD Kabupaten Tangerang yang sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan Renja SKPD se Kabupaten Tangerang yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di wilayah Kabupaten Tangerang.

Rancangan RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2025 dibuat dengan mempertimbangkan kebutuhan yang ada berdasarkan Rancangan RKPD serta memperhatikan sasaran dan prioritas pembangunan, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja Perangkat Daerah. Secara garis besar rumusan program dan kegiatan maupun kebutuhan dana telah sesuai dengan adanya rancangan RKPD yang disajikan pada Tabel 2.5.

Tabel 2.5
Review Terhadap Rancangan Perubahan Rencana Kerja
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang Tahun 2025

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							
			TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				**27.296.576.052,00**	**41.333.640.489,00**	**39.244.869.039,00**	**11.948.292.987,00**		
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**27.296.576.052,00**	**41.333.640.489,00**	**39.244.869.039,00**	**11.948.292.987,00**		
2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**				**27.296.576.052,00**	**41.333.640.489,00**	**39.244.869.039,00**	**11.948.292.987,00**		
2.12.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan**	**100 Persen**	**100 Persen**	**25.487.372.692,00**	**31.303.000.449,00**	**29.640.197.989,00**	**3.098.142.556,00**		
2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	10 Dokumen	10 Dokumen	357.098.640,00	596.430.749,00	455.383.706,00	98.285.066,00		
2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	7 Dokumen	227.098.640,00	353.199.610,00	307.833.020,00	80.734.380,00	Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.12.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							
			TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan	65.000.000,00	115.721.139,00	68.793.670,00	3.793.670,00	Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.12.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	65.000.000,00	127.510.000,00	78.757.016,00	13.757.016,00	Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah laporan keuangan*	2 Dokumen	2 Dokumen	18.001.732.052,00	19.250.170.264,00	18.668.355.206,00	666.623.154,00		
2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/ bulan	12 Orang/ bulan	17.796.576.052,00	19.072.229.054,00	18.535.843.206,00	739.267.154,00	Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.12.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	2 Laporan	12 Laporan	205.156.000,00	177.941.210,00	132.512.000,00	-72.644.000,00	Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Pembinaan Pegawai*	1 Dokumen	1 Dokumen	540.000.000,00	369.837.000,00	275.563.000,00	-264.437.000,00		

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							
			TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
2.12.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	260 Orang	260 Orang	540.000.000,00	369.837.000,00	275.563.000,00	-264.437.000,00	Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah*	8 Dokumen	8 Dokumen	2.198.018.000,00	6.550.766.960,00	5.401.200.601,00	3.203.182.601,00		
2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	10.800.000,00	10.801.500,00	10.801.500,00	1.500,00	Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	540.082.000,00	1.811.005.550,00	1.820.077.550,00	1.279.995.550,00	Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.12.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	54.000.000,00	50.736.000,00	50.736.000,00	-3.264.000,00	Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	1.080.000.000,00	3.911.454.350,00	3.023.663.821,00	1.943.663.821,00	Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	15 Paket	15 Paket	108.000.000,00	140.619.660,00	115.489.730,00	7.489.730,00	Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							
			TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
2.12.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	3 Dokumen	27.000.000,00	27.002.900,00	31.545.000,00	4.545.000,00	Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.12.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	108.000.000,00	129.446.000,00	102.556.000,00	-5.444.000,00	Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	270.136.000,00	469.701.000,00	246.331.000,00	-23.805.000,00	Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia*	2 Dokumen	2 Dokumen	3.661.524.000,00	3.939.925.568,00	4.230.325.568,00	568.801.568,00		
2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	5.760.000,00	0,00	0,00	-5.760.000,00	Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	3.655.764.000,00	3.939.925.568,00	4.230.325.568,00	574.561.568,00	Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							
			TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	3 Unit	3 Unit	729.000.000,00	595.869.908,00	609.369.908,00	-119.630.092,00		
2.12.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	19 Unit	19 Unit	270.000.000,00	514.869.908,00	514.869.908,00	244.869.908,00	Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.12.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	50 Unit	81.000.000,00	81.000.000,00	94.500.000,00	13.500.000,00	Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.12.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	378.000.000,00	0,00	0,00	-378.000.000,00	Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.12.02	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	**Cakupan SKPWNI dan SKDWNI yang diterbitkan Cakupan kepemilikan KIA Cakupan Perekaman KTP-el**	**-**	**100 60 99.40 % % %**	**795.203.500,00**	**8.738.361.000,00**	**8.532.136.550,00**	**231.516.150,00**		
2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	*Jumlah Dokumen Pelayanan Pendaftaran Penduduk*	9 Dokumen	9 Dokumen	559.182.000,00	479.093.000,00	337.758.550,00	-221.423.450,00		
2.12.02.2.01.0001	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan									
		Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	16.500 Dokumen	16.500 Dokumen	217.994.000,00	144.000.000,00	72.000.000,00	-145.994.000,00	Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.12.02.2.01.0003	Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk									

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							
			TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
		Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Pelayanan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	181 Orang	181 Orang	187.000.000,00	50.423.000,00	37.326.250,00	-149.673.750,00	Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.12.02.2.01.0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk									
		Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	1 Laporan	71.188.000,00	188.981.000,00	141.732.300,00	70.544.300,00	Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.12.02.2.01.0006	Pencatatan Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan									
		Jumlah Laporan Pencatatan Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	12 Laporan	12 Laporan	83.000.000,00	95.689.000,00	86.700.000,00	3.700.000,00	Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.12.02.2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk	*Jumlah Blanko KIA yang tersedia*	55.794 Dokumen	37.500 Dokumen	197.021.500,00	8.250.000.000,00	8.187.500.000,00	7.990.478.500,00		
2.12.02.2.02.0002	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan									
		Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	30.311 Dokumen	30.311 Dokumen	197.021.500,00	8.250.000.000,00	8.187.500.000,00	7.990.478.500,00	Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	*Jumlah Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan*	1 Dokumen	1 Dokumen	39.000.000,00	9.268.000,00	6.878.000,00	-32.122.000,00		
2.12.02.2.03.0004	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk									
		Jumlah Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk yang Dimanfaatkan	6 Dokumen	6 Dokumen	39.000.000,00	9.268.000,00	6.878.000,00	-32.122.000,00	Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							
			TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
2.12.03	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**Cakupan Kepemilikan Akte Kematian Cakupan Kepemilikan Akte Kelahiran**	**100% 99,50 %**	**100% 92.00 %**	**216.000.000,00**	**227.350.000,00**	**165.920.000,00**	**184.000.000,00**		
2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	*Jumlah Laporan Pelayanan Pencatatan Sipil*	5 Laporan	5 Laporan	216.000.000,00	227.350.000,00	165.920.000,00	-50.080.000,00		
2.12.03.2.01.0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting									
		Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	5 Dokumen	5 Dokumen	216.000.000,00	227.350.000,00	165.920.000,00	-50.080.000,00	Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.12.04	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	**Persentase Jaringan SIAK dalam Kondisi Baik**	**100 %**	**100 %**	**726.214.600,00**	**991.209.520,00**	**837.434.500,00**	**709.273.400,00**		
2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	*Persentase Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan*	100 %	100 %	135.000.000,00	134.999.520,00	99.810.360,00	-35.189.640,00		
2.12.04.2.01.0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan									
		Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	13 Dokumen	5 Dokumen	135.000.000,00	134.999.520,00	99.810.360,00	-35.189.640,00	Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							
			TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
2.12.04.2.02	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	*Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan*	1 Dokumen	1 Dokumen	26.898.000,00	22.850.000,00	19.930.000,00	-6.968.000,00		
2.12.04.2.02.0001	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan									
		Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	26.898.000,00	22.850.000,00	19.930.000,00	-6.968.000,00	Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	*Terlaksananya Aktivasi Indentitas Kependudukan Digital (IKD)*	1 Laporan	1 Laporan	406.851.600,00	704.980.000,00	646.019.140,00	239.167.540,00		
2.12.04.2.03.0003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan									
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan	1 Laporan	116.880.000,00	416.760.000,00	413.332.000,00	296.452.000,00	Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.12.04.2.03.0005	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan									
		Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan	1 Laporan	90.790.000,00	90.100.000,00	78.417.140,00	-12.372.860,00	Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.12.04.2.03.0007	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat									

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							
			TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
		Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	1 Laporan	1 Laporan	199.181.600,00	198.120.000,00	154.270.000,00	-44.911.600,00	Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.12.04.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	*Meningkatnya Pengetahuan dan Pemahaman Pengelola SIAK Kecamatan dan Dinas terhadap Aplikasi dan Peraturan terbaru tentang SIAK*	2 Laporan	2 Laporan	157.465.000,00	128.380.000,00	71.675.000,00	-85.790.000,00		
2.12.04.2.04.0001	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan									
		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	4 Laporan	4 Laporan	37.400.000,00	37.300.000,00	20.475.000,00	-16.925.000,00	Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.12.04.2.04.0003	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan									
		Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	4 Laporan	4 Laporan	120.065.000,00	91.080.000,00	51.200.000,00	-68.865.000,00	Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.12.05	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	**Persentase Pemenuhan Pengelolaan Profil Kependudukan**	**100 Persen**	**100 Persen**	**71.785.260,00**	**73.719.520,00**	**69.180.000,00**	**214.740,00**		
2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	*Jumlah Dokumen Data Profil Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang*	1 Dokumen	1 Dokumen	71.785.260,00	73.719.520,00	69.180.000,00	-2.605.260,00		
2.12.05.2.01.0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain									

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							
			TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
		Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	2 Dokumen	2 Dokumen	71.785.260,00	73.719.520,00	69.180.000,00	-2.605.260,00	Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
J U M L A H					**27.296.576.052,00**	**41.333.640.489,00**	**39.244.869.039,00**	**1.284.717.462.164,00**		

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Melalui Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dilakukan sebagai bagian dari penyelarasan antara aspirasi masyarakat dan prioritas pembangunan daerah. Usulan dihimpun melalui salah satunya adalah Forum Konsultasi Publik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang diantaranya:

a. Penambahan dasar hukum terkait Pelayanan administrasi kependudukan
b. Melakukan update pada Nomor penanganan aduan, saran, dan masukan
c. Perubahan waktu dan penambahan menu Identitas Kependudukan Digital (IKD)
d. Pelaksanaan peninjauan ulang/review Standar Pelayanan akan diagendakan secara berkelanjutan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai pelaksana kegiatan selalu berkoordinasi dengan Bappeda selaku Pelaksana Perencanaan di tingkat Kabupaten agar pelaksana kegiatan bisa terarah dan terukur untuk mencapai program dan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, agar selaras dengan RPD Kabupaten Tangerang 2024- 2026. Berikut usulan program dan kegiatan Tahun 2025 Hasil Forum Gabungan Perangkat Daerah yang tercantum dalam Renstra, dapat dilihat pada Tabel 2.6 berikut:

Tabel 2.6
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kabupaten Tangerang (Hasil Forum Gabungan Perangkat Daerah yang tercantum dalam Renstra)

No	Program	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
BELUM ADA USULAN					

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TANGERANG

Perubahan Renja Kabupaten Tangerang tahun 2025 berisi rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD Kabupaten Tangerang pada tahun 2025, RKPD tahun 2025, evaluasi tahun berjalan dan sasaran pembangunan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang.

Evaluasi terhadap hasil Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang tahun 2025 hingga Triwulan II (01 Januari – 12 Juni 2025) dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1
Evaluasi Rencana Kerja dan Pendanaan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Uraian	Pagu Anggaran	Jumlah Realisasi (Rp.)			Lebih / (Kurang)	
			S/D Periode Lalu	Periode Ini	Total	(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 3	8
5	**BELANJA DAERAH**						
2.12.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA**	29.886.040.837,00	0	10.513.528.865,00	10.513.528.865,00	-19.372.511.972,00	35,18
2.12.01.2.01	**PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH**	455.383.706,00	0	102.910.000,00	102.910.000,00	-352.473.706,00	22,6
2.12.01.2.01.0001	**Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**	307.833.020,00	0	56.520.000,00	56.520.000,00	-251.313.020,00	18,36
2.12.01.2.01.0001.5.1	**BELANJA OPERASI**	307.833.020,00	0	56.520.000,00	56.520.000,00	-251.313.020,00	18,36
2.12.01.2.01.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	307.833.020,00	0	56.520.000,00	56.520.000,00	-251.313.020,00	18,36
2.12.01.2.01.0001.5.1.02.01	Belanja Barang	195.580.000,00	0	56.020.000,00	56.020.000,00	-139.560.000,00	28,64
2.12.01.2.01.0001.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	195.580.000,00	0	56.020.000,00	56.020.000,00	-139.560.000,00	28,64
2.12.01.2.01.0001.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	70.750.000,00	0	20.980.000,00	20.980.000,00	-49.770.000,00	29,65
2.12.01.2.01.0001.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	124.830.000,00	0	35.040.000,00	35.040.000,00	-89.790.000,00	28,07
2.12.01.2.01.0001.5.1.02.02	Belanja Jasa	112.253.020,00	0	500.000,00	500.000,00	-111.753.020,00	0,45
2.12.01.2.01.0001.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	48.533.020,00	0	500.000,00	500.000,00	-48.033.020,00	1,03
2.12.01.2.01.0001.5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	0	500.000,00	500.000,00	-1.000.000,00	33,33
2.12.01.2.01.0001.5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan / Reklame, Film, dan Pemotretan	47.033.020,00	0	0	0	-47.033.020,00	0
2.12.01.2.01.0001.5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	63.720.000,00	0	0	0	-63.720.000,00	0
2.12.01.2.01.0001.5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	63.720.000,00	0	0	0	-63.720.000,00	0
2.12.01.2.01.0006	**Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD**	68.793.670,00	0	34.450.000,00	34.450.000,00	-34.343.670,00	50,08
2.12.01.2.01.0006.5.1	**BELANJA OPERASI**	68.793.670,00	0	34.450.000,00	34.450.000,00	-34.343.670,00	50,08
2.12.01.2.01.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	68.793.670,00	0	34.450.000,00	34.450.000,00	-34.343.670,00	50,08
2.12.01.2.01.0006.5.1.02.01	Belanja Barang	51.093.670,00	0	16.750.000,00	16.750.000,00	-34.343.670,00	32,78
2.12.01.2.01.0006.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	51.093.670,00	0	16.750.000,00	16.750.000,00	-34.343.670,00	32,78
2.12.01.2.01.0006.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	24.813.670,00	0	5.800.000,00	5.800.000,00	-19.013.670,00	23,37
2.12.01.2.01.0006.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	26.280.000,00	0	10.950.000,00	10.950.000,00	-15.330.000,00	41,67
2.12.01.2.01.0006.5.1.02.02	Belanja Jasa	17.700.000,00	0	17.700.000,00	17.700.000,00	0	100
2.12.01.2.01.0006.5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	17.700.000,00	0	17.700.000,00	17.700.000,00	0	100
2.12.01.2.01.0006.5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	17.700.000,00	0	17.700.000,00	17.700.000,00	0	100
2.12.01.2.01.0007	**Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	78.757.016,00	0	11.940.000,00	11.940.000,00	-66.817.016,00	15,16
2.12.01.2.01.0007.5.1	**BELANJA OPERASI**	78.757.016,00	0	11.940.000,00	11.940.000,00	-66.817.016,00	15,16

No	Uraian	Pagu Anggaran	Jumlah Realisasi (Rp.)			Lebih / (Kurang)	
			S/D Periode Lalu	Periode Ini	Total	(Rp.)	%
2.12.01.2.01.0007.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	78.757.016,00	0	11.940.000,00	11.940.000,00	-66.817.016,00	15,16
2.12.01.2.01.0007.5.1.02.01	Belanja Barang	60.057.016,00	0	11.940.000,00	11.940.000,00	-48.117.016,00	19,88
2.12.01.2.01.0007.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	60.057.016,00	0	11.940.000,00	11.940.000,00	-48.117.016,00	19,88
2.12.01.2.01.0007.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	31.587.016,00	0	3.180.000,00	3.180.000,00	-28.407.016,00	10,07
2.12.01.2.01.0007.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	28.470.000,00	0	8.760.000,00	8.760.000,00	-19.710.000,00	30,77
2.12.01.2.01.0007.5.1.02.02	Belanja Jasa	18.700.000,00	0	0	0	-18.700.000,00	0
2.12.01.2.01.0007.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	0	0	0	-1.000.000,00	0
2.12.01.2.01.0007.5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	1.000.000,00	0	0	0	-1.000.000,00	0
2.12.01.2.01.0007.5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	17.700.000,00	0	0	0	-17.700.000,00	0
2.12.01.2.01.0007.5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	17.700.000,00	0	0	0	-17.700.000,00	0
2.12.01.2.02	**ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH**	19.204.741.054,00	0	8.141.656.510,00	8.141.656.510,00	-11.063.084.544,00	42,39
2.12.01.2.02.0001	**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**	19.072.229.054,00	0	8.115.370.510,00	8.115.370.510,00	-10.956.858.544,00	42,55
2.12.01.2.02.0001.5.1	**BELANJA OPERASI**	19.072.229.054,00	0	8.115.370.510,00	8.115.370.510,00	-10.956.858.544,00	42,55
2.12.01.2.02.0001.5.1.01	Belanja Pegawai	19.072.229.054,00	0	8.115.370.510,00	8.115.370.510,00	-10.956.858.544,00	42,55
2.12.01.2.02.0001.5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	7.583.384.806,00	0	3.535.371.066,00	3.535.371.066,00	-4.048.013.740,00	46,62
2.12.01.2.02.0001.5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	4.725.846.960,00	0	2.294.783.136,00	2.294.783.136,00	-2.431.063.824,00	48,56
2.12.01.2.02.0001.5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	4.162.013.360,00	0	2.197.432.840,00	2.197.432.840,00	-1.964.580.520,00	52,8
2.12.01.2.02.0001.5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	563.833.600,00	0	97.350.296,00	97.350.296,00	-466.483.304,00	17,27
2.12.01.2.02.0001.5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	536.711.626,00	0	233.607.773,00	233.607.773,00	-303.103.853,00	43,53
2.12.01.2.02.0001.5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	457.774.922,00	0	227.586.018,00	227.586.018,00	-230.188.904,00	49,72
2.12.01.2.02.0001.5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	78.936.704,00	0	6.021.755,00	6.021.755,00	-72.914.949,00	7,63
2.12.01.2.02.0001.5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	125.403.250,00	0	64.255.000,00	64.255.000,00	-61.148.250,00	51,24
2.12.01.2.02.0001.5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	125.403.250,00	0	64.255.000,00	64.255.000,00	-61.148.250,00	51,24
2.12.01.2.02.0001.5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	196.327.600,00	0	118.400.000,00	118.400.000,00	-77.927.600,00	60,31
2.12.01.2.02.0001.5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	196.327.600,00	0	118.400.000,00	118.400.000,00	-77.927.600,00	60,31
2.12.01.2.02.0001.5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	199.900.000,00	0	78.573.332,00	78.573.332,00	-121.326.668,00	39,31
2.12.01.2.02.0001.5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	147.100.000,00	0	72.240.000,00	72.240.000,00	-74.860.000,00	49,11
2.12.01.2.02.0001.5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	52.800.000,00	0	6.333.332,00	6.333.332,00	-46.466.668,00	11,99
2.12.01.2.02.0001.5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	323.395.124,00	0	134.713.270,00	134.713.270,00	-188.681.854,00	41,66
2.12.01.2.02.0001.5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	272.411.444,00	0	128.980.020,00	128.980.020,00	-143.431.424,00	47,35
2.12.01.2.02.0001.5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	50.983.680,00	0	5.733.250,00	5.733.250,00	-45.250.430,00	11,25
2.12.01.2.02.0001.5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus ASN	949.763.300,00	0	408.470.374,00	408.470.374,00	-541.292.926,00	43,01
2.12.01.2.02.0001.5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus PNS	949.763.300,00	0	408.470.374,00	408.470.374,00	-541.292.926,00	43,01
2.12.01.2.02.0001.5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	60.554,00	0	31.743,00	31.743,00	-28.811,00	52,42
2.12.01.2.02.0001.5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	60.554,00	0	31.743,00	31.743,00	-28.811,00	52,42
2.12.01.2.02.0001.5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	465.725.928,00	0	185.920.924,00	185.920.924,00	-279.805.004,00	39,92
2.12.01.2.02.0001.5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	438.578.568,00	0	181.763.671,00	181.763.671,00	-256.814.897,00	41,44
2.12.01.2.02.0001.5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	27.147.360,00	0	4.157.253,00	4.157.253,00	-22.990.107,00	15,31
2.12.01.2.02.0001.5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	9.904.200,00	0	4.153.858,00	4.153.858,00	-5.750.342,00	41,94
2.12.01.2.02.0001.5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	8.674.020,00	0	3.932.503,00	3.932.503,00	-4.741.517,00	45,34
2.12.01.2.02.0001.5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	1.230.180,00	0	221.355,00	221.355,00	-1.008.825,00	17,99
2.12.01.2.02.0001.5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	29.712.552,00	0	12.461.656,00	12.461.656,00	-17.250.896,00	41,94

No	Uraian	Pagu Anggaran	Jumlah Realisasi (Rp.)			Lebih / (Kurang)	
			S/D Periode Lalu	Periode Ini	Total	(Rp.)	%
2.12.01.2.02.0001.5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	26.022.012,00	0	11.797.621,00	11.797.621,00	-14.224.391,00	45,34
2.12.01.2.02.0001.5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	3.690.540,00	0	664.035,00	664.035,00	-3.026.505,00	17,99
2.12.01.2.02.0001.5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	20.633.712,00	0	0	0	-20.633.712,00	0
2.12.01.2.02.0001.5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	18.070.832,00	0	0	0	-18.070.832,00	0
2.12.01.2.02.0001.5.1.01.01.12.0002	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	2.562.880,00	0	0	0	-2.562.880,00	0
2.12.01.2.02.0001.5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	11.488.844.248,00	0	4.579.999.444,00	4.579.999.444,00	-6.908.844.804,00	39,86
2.12.01.2.02.0001.5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	9.754.031.448,00	0	3.882.742.431,00	3.882.742.431,00	-5.871.289.017,00	39,81
2.12.01.2.02.0001.5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	9.754.031.448,00	0	3.882.742.431,00	3.882.742.431,00	-5.871.289.017,00	39,81
2.12.01.2.02.0001.5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	302.163.652,00	0	122.351.875,00	122.351.875,00	-179.811.777,00	40,49
2.12.01.2.02.0001.5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	302.163.652,00	0	122.351.875,00	122.351.875,00	-179.811.777,00	40,49
2.12.01.2.02.0001.5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	1.432.649.148,00	0	574.905.138,00	574.905.138,00	-857.744.010,00	40,13
2.12.01.2.02.0001.5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1.432.649.148,00	0	574.905.138,00	574.905.138,00	-857.744.010,00	40,13
2.12.01.2.02.0007	**Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD**	132.512.000,00	0	26.286.000,00	26.286.000,00	-106.226.000,00	19,84
2.12.01.2.02.0007.5.1	**BELANJA OPERASI**	132.512.000,00	0	26.286.000,00	26.286.000,00	-106.226.000,00	19,84
2.12.01.2.02.0007.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	132.512.000,00	0	26.286.000,00	26.286.000,00	-106.226.000,00	19,84
2.12.01.2.02.0007.5.1.02.01	Belanja Barang	36.140.000,00	0	26.286.000,00	26.286.000,00	-9.854.000,00	72,73
2.12.01.2.02.0007.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	36.140.000,00	0	26.286.000,00	26.286.000,00	-9.854.000,00	72,73
2.12.01.2.02.0007.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	23.876.000,00	0	15.190.000,00	15.190.000,00	-8.686.000,00	63,62
2.12.01.2.02.0007.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.264.000,00	0	11.096.000,00	11.096.000,00	-1.168.000,00	90,48
2.12.01.2.02.0007.5.1.02.02	Belanja Jasa	96.372.000,00	0	0	0	-96.372.000,00	0
2.12.01.2.02.0007.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	3.300.000,00	0	0	0	-3.300.000,00	0
2.12.01.2.02.0007.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.800.000,00	0	0	0	-2.800.000,00	0
2.12.01.2.02.0007.5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	500.000,00	0	0	0	-500.000,00	0
2.12.01.2.02.0007.5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	93.072.000,00	0	0	0	-93.072.000,00	0
2.12.01.2.02.0007.5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	93.072.000,00	0	0	0	-93.072.000,00	0
2.12.01.2.05	**ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH**	275.563.000,00	0	224.632.000,00	224.632.000,00	-50.931.000,00	81,52
2.12.01.2.05.0009	**Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi**	275.563.000,00	0	224.632.000,00	224.632.000,00	-50.931.000,00	81,52
2.12.01.2.05.0009.5.1	**BELANJA OPERASI**	275.563.000,00	0	224.632.000,00	224.632.000,00	-50.931.000,00	81,52
2.12.01.2.05.0009.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	275.563.000,00	0	224.632.000,00	224.632.000,00	-50.931.000,00	81,52
2.12.01.2.05.0009.5.1.02.01	Belanja Barang	29.043.000,00	0	9.760.000,00	9.760.000,00	-19.283.000,00	33,61
2.12.01.2.05.0009.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	29.043.000,00	0	9.760.000,00	9.760.000,00	-19.283.000,00	33,61
2.12.01.2.05.0009.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	29.043.000,00	0	9.760.000,00	9.760.000,00	-19.283.000,00	33,61
2.12.01.2.05.0009.5.1.02.02	Belanja Jasa	246.520.000,00	0	214.872.000,00	214.872.000,00	-31.648.000,00	87,16
2.12.01.2.05.0009.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	28.900.000,00	0	0	0	-28.900.000,00	0
2.12.01.2.05.0009.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	7.900.000,00	0	0	0	-7.900.000,00	0
2.12.01.2.05.0009.5.1.02.02.01.0036	Belanja Jasa Audit / Surveillance ISO	21.000.000,00	0	0	0	-21.000.000,00	0
2.12.01.2.05.0009.5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	0	0	0	0	0	0
2.12.01.2.05.0009.5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	0	0	0	0	0	0
2.12.01.2.05.0009.5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	217.620.000,00	0	214.872.000,00	214.872.000,00	-2.748.000,00	98,74
2.12.01.2.05.0009.5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	217.620.000,00	0	214.872.000,00	214.872.000,00	-2.748.000,00	98,74
2.12.01.2.06	**ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH**	5.414.557.601,00	0	297.494.121,00	297.494.121,00	-5.117.063.480,00	5,49
2.12.01.2.06.0001	**Penyediaan Komponen InstalasirnnListrik/Penerangan Bangunan Kantor**	10.801.500,00	0	10.801.500,00	10.801.500,00	0	100

No	Uraian	Pagu Anggaran	Jumlah Realisasi (Rp.)			Lebih / (Kurang)	
			S/D Periode Lalu	Periode Ini	Total	(Rp.)	%
2.12.01.2.06.0001.5.1	**BELANJA OPERASI**	10.801.500,00	0	10.801.500,00	10.801.500,00	0	100
2.12.01.2.06.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.801.500,00	0	10.801.500,00	10.801.500,00	0	100
2.12.01.2.06.0001.5.1.02.01	Belanja Barang	10.801.500,00	0	10.801.500,00	10.801.500,00	0	100
2.12.01.2.06.0001.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	10.801.500,00	0	10.801.500,00	10.801.500,00	0	100
2.12.01.2.06.0001.5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	10.801.500,00	0	10.801.500,00	10.801.500,00	0	100
2.12.01.2.06.0002	**Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**	1.811.005.550,00	0	11.928.000,00	11.928.000,00	-1.799.077.550,00	0,66
2.12.01.2.06.0002.5.1	**BELANJA OPERASI**	11.928.000,00	0	11.928.000,00	11.928.000,00	0	100
2.12.01.2.06.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.928.000,00	0	11.928.000,00	11.928.000,00	0	100
2.12.01.2.06.0002.5.1.02.01	Belanja Barang	11.928.000,00	0	11.928.000,00	11.928.000,00	0	100
2.12.01.2.06.0002.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.036.000,00	0	1.036.000,00	1.036.000,00	0	100
2.12.01.2.06.0002.5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.036.000,00	0	1.036.000,00	1.036.000,00	0	100
2.12.01.2.06.0002.5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	10.892.000,00	0	10.892.000,00	10.892.000,00	0	100
2.12.01.2.06.0002.5.1.02.01.02.0004	Belanja Komponen-Komponen Rambu-Rambu	10.892.000,00	0	10.892.000,00	10.892.000,00	0	100
2.12.01.2.06.0002.5.2	**BELANJA MODAL**	1.799.077.550,00	0	0	0	-1.799.077.550,00	0
2.12.01.2.06.0002.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.799.077.550,00	0	0	0	-1.799.077.550,00	0
2.12.01.2.06.0002.5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	47.466.000,00	0	0	0	-47.466.000,00	0
2.12.01.2.06.0002.5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	35.910.000,00	0	0	0	-35.910.000,00	0
2.12.01.2.06.0002.5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	35.910.000,00	0	0	0	-35.910.000,00	0
2.12.01.2.06.0002.5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	11.556.000,00	0	0	0	-11.556.000,00	0
2.12.01.2.06.0002.5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	11.556.000,00	0	0	0	-11.556.000,00	0
2.12.01.2.06.0002.5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	112.166.000,00	0	0	0	-112.166.000,00	0
2.12.01.2.06.0002.5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	112.166.000,00	0	0	0	-112.166.000,00	0
2.12.01.2.06.0002.5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	2.475.000,00	0	0	0	-2.475.000,00	0
2.12.01.2.06.0002.5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	107.069.000,00	0	0	0	-107.069.000,00	0
2.12.01.2.06.0002.5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	2.622.000,00	0	0	0	-2.622.000,00	0
2.12.01.2.06.0002.5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	150.506.250,00	0	0	0	-150.506.250,00	0
2.12.01.2.06.0002.5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	150.506.250,00	0	0	0	-150.506.250,00	0
2.12.01.2.06.0002.5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	150.506.250,00	0	0	0	-150.506.250,00	0
2.12.01.2.06.0002.5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	1.488.939.300,00	0	0	0	-1.488.939.300,00	0
2.12.01.2.06.0002.5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	231.125.500,00	0	0	0	-231.125.500,00	0
2.12.01.2.06.0002.5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	231.125.500,00	0	0	0	-231.125.500,00	0
2.12.01.2.06.0002.5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	1.257.813.800,00	0	0	0	-1.257.813.800,00	0
2.12.01.2.06.0002.5.2.02.10.02.0002	Belanja Modal Peralatan Mini Computer	1.250.304.000,00	0	0	0	-1.250.304.000,00	0
2.12.01.2.06.0002.5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	7.509.800,00	0	0	0	-7.509.800,00	0
2.12.01.2.06.0003	**Penyediaan Peralatan Rumah Tangga**	50.736.000,00	0	31.173.000,00	31.173.000,00	-19.563.000,00	61,44
2.12.01.2.06.0003.5.1	**BELANJA OPERASI**	31.269.000,00	0	31.173.000,00	31.173.000,00	-96.000,00	99,69
2.12.01.2.06.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.269.000,00	0	31.173.000,00	31.173.000,00	-96.000,00	99,69
2.12.01.2.06.0003.5.1.02.01	Belanja Barang	31.269.000,00	0	31.173.000,00	31.173.000,00	-96.000,00	99,69
2.12.01.2.06.0003.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	28.494.000,00	0	28.398.000,00	28.398.000,00	-96.000,00	99,66
2.12.01.2.06.0003.5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	561.000,00	0	561.000,00	561.000,00	0	100
2.12.01.2.06.0003.5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	12.702.000,00	0	12.702.000,00	12.702.000,00	0	100
2.12.01.2.06.0003.5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	96.000,00	0	0	0	-96.000,00	0
2.12.01.2.06.0003.5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	14.065.000,00	0	14.065.000,00	14.065.000,00	0	100
2.12.01.2.06.0003.5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	1.070.000,00	0	1.070.000,00	1.070.000,00	0	100

No	Uraian	Pagu Anggaran	Jumlah Realisasi (Rp.)			Lebih / (Kurang)	
			S/D Periode Lalu	Periode Ini	Total	(Rp.)	%
2.12.01.2.06.0003.5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	2.775.000,00	0	2.775.000,00	2.775.000,00	0	100
2.12.01.2.06.0003.5.1.02.01.04.0089	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-AlatUkur/Pembanding	2.775.000,00	0	2.775.000,00	2.775.000,00	0	100
2.12.01.2.06.0003.5.2	**BELANJA MODAL**	19.467.000,00	0	0	0	-19.467.000,00	0
2.12.01.2.06.0003.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.467.000,00	0	0	0	-19.467.000,00	0
2.12.01.2.06.0003.5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	19.467.000,00	0	0	0	-19.467.000,00	0
2.12.01.2.06.0003.5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	19.467.000,00	0	0	0	-19.467.000,00	0
2.12.01.2.06.0003.5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	19.467.000,00	0	0	0	-19.467.000,00	0
2.12.01.2.06.0004	**Penyediaan Bahan Logistik Kantor**	3.035.167.151,00	0	18.548.700,00	18.548.700,00	-3.016.618.451,00	0,61
2.12.01.2.06.0004.5.1	**BELANJA OPERASI**	3.035.167.151,00	0	18.548.700,00	18.548.700,00	-3.016.618.451,00	0,61
2.12.01.2.06.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.035.167.151,00	0	18.548.700,00	18.548.700,00	-3.016.618.451,00	0,61
2.12.01.2.06.0004.5.1.02.01	Belanja Barang	3.035.167.151,00	0	18.548.700,00	18.548.700,00	-3.016.618.451,00	0,61
2.12.01.2.06.0004.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	3.035.167.151,00	0	18.548.700,00	18.548.700,00	-3.016.618.451,00	0,61
2.12.01.2.06.0004.5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	2.871.000,00	0	0	0	-2.871.000,00	0
2.12.01.2.06.0004.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	18.548.700,00	0	18.548.700,00	18.548.700,00	0	100
2.12.01.2.06.0004.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	116.284.800,00	0	0	0	-116.284.800,00	0
2.12.01.2.06.0004.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.630.247.150,00	0	0	0	-2.630.247.150,00	0
2.12.01.2.06.0004.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.118.000,00	0	0	0	-1.118.000,00	0
2.12.01.2.06.0004.5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	257.465.000,00	0	0	0	-257.465.000,00	0
2.12.01.2.06.0004.5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	8.632.500,00	0	0	0	-8.632.500,00	0
2.12.01.2.06.0004.5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	1	0	0	0	-1	0
2.12.01.2.06.0005	**Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan**	115.471.400,00	0	97.960.921,00	97.960.921,00	-17.510.479,00	84,84
2.12.01.2.06.0005.5.1	**BELANJA OPERASI**	115.471.400,00	0	97.960.921,00	97.960.921,00	-17.510.479,00	84,84
2.12.01.2.06.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	115.471.400,00	0	97.960.921,00	97.960.921,00	-17.510.479,00	84,84
2.12.01.2.06.0005.5.1.02.01	Belanja Barang	115.471.400,00	0	97.960.921,00	97.960.921,00	-17.510.479,00	84,84
2.12.01.2.06.0005.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	115.389.400,00	0	97.960.921,00	97.960.921,00	-17.428.479,00	84,9
2.12.01.2.06.0005.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.390.900,00	0	5.390.900,00	5.390.900,00	0	100
2.12.01.2.06.0005.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	76.366.500,00	0	58.938.021,00	58.938.021,00	-17.428.479,00	77,18
2.12.01.2.06.0005.5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual / Diserahkan kepada Masyarakat	33.632.000,00	0	33.632.000,00	33.632.000,00	0	100
2.12.01.2.06.0005.5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	82.000,00	0	0	0	-82.000,00	0
2.12.01.2.06.0005.5.1.02.01.04.0122	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat RumahTangga-Alat Dapur	82.000,00	0	0	0	-82.000,00	0
2.12.01.2.06.0006	**Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan**	31.545.000,00	0	10.674.000,00	10.674.000,00	-20.871.000,00	33,84
2.12.01.2.06.0006.5.1	**BELANJA OPERASI**	31.545.000,00	0	10.674.000,00	10.674.000,00	-20.871.000,00	33,84
2.12.01.2.06.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.545.000,00	0	10.674.000,00	10.674.000,00	-20.871.000,00	33,84
2.12.01.2.06.0006.5.1.02.01	Belanja Barang	0	0	0	0	0	0
2.12.01.2.06.0006.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	0	0	0	0	0	0
2.12.01.2.06.0006.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	0	0	0	0	0	0
2.12.01.2.06.0006.5.1.02.02	Belanja Jasa	31.545.000,00	0	10.674.000,00	10.674.000,00	-20.871.000,00	33,84
2.12.01.2.06.0006.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	31.545.000,00	0	10.674.000,00	10.674.000,00	-20.871.000,00	33,84
2.12.01.2.06.0006.5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal / Surat Kabar / Majalah	31.545.000,00	0	10.674.000,00	10.674.000,00	-20.871.000,00	33,84
2.12.01.2.06.0008	**Fasilitasi Kunjungan Tamu**	99.260.000,00	0	65.548.000,00	65.548.000,00	-33.712.000,00	66,04
2.12.01.2.06.0008.5.1	**BELANJA OPERASI**	99.260.000,00	0	65.548.000,00	65.548.000,00	-33.712.000,00	66,04
2.12.01.2.06.0008.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.260.000,00	0	65.548.000,00	65.548.000,00	-33.712.000,00	66,04
2.12.01.2.06.0008.5.1.02.01	Belanja Barang	99.260.000,00	0	65.548.000,00	65.548.000,00	-33.712.000,00	66,04

No	Uraian	Pagu Anggaran	Jumlah Realisasi (Rp.)			Lebih / (Kurang)	
			S/D Periode Lalu	Periode Ini	Total	(Rp.)	%
2.12.01.2.06.0008.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	99.260.000,00	0	65.548.000,00	65.548.000,00	-33.712.000,00	66,04
2.12.01.2.06.0008.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	90.500.000,00	0	60.298.000,00	60.298.000,00	-30.202.000,00	66,63
2.12.01.2.06.0008.5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	8.760.000,00	0	5.250.000,00	5.250.000,00	-3.510.000,00	59,93
2.12.01.2.06.0009	**Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**	260.571.000,00	0	50.860.000,00	50.860.000,00	-209.711.000,00	19,52
2.12.01.2.06.0009.5.1	**BELANJA OPERASI**	260.571.000,00	0	50.860.000,00	50.860.000,00	-209.711.000,00	19,52
2.12.01.2.06.0009.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	260.571.000,00	0	50.860.000,00	50.860.000,00	-209.711.000,00	19,52
2.12.01.2.06.0009.5.1.02.02	Belanja Jasa	68.640.000,00	0	1.050.000,00	1.050.000,00	-67.590.000,00	1,53
2.12.01.2.06.0009.5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	18.240.000,00	0	0	0	-18.240.000,00	0
2.12.01.2.06.0009.5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	18.240.000,00	0	0	0	-18.240.000,00	0
2.12.01.2.06.0009.5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	50.400.000,00	0	1.050.000,00	1.050.000,00	-49.350.000,00	2,08
2.12.01.2.06.0009.5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	50.400.000,00	0	1.050.000,00	1.050.000,00	-49.350.000,00	2,08
2.12.01.2.06.0009.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	191.931.000,00	0	49.810.000,00	49.810.000,00	-142.121.000,00	25,95
2.12.01.2.06.0009.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	191.931.000,00	0	49.810.000,00	49.810.000,00	-142.121.000,00	25,95
2.12.01.2.06.0009.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	148.680.000,00	0	47.890.000,00	47.890.000,00	-100.790.000,00	32,21
2.12.01.2.06.0009.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6.375.000,00	0	1.920.000,00	1.920.000,00	-4.455.000,00	30,12
2.12.01.2.06.0009.5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	36.876.000,00	0	0	0	-36.876.000,00	0
2.12.01.2.08	**PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	3.939.925.568,00	0	1.531.275.000,00	1.531.275.000,00	-2.408.650.568,00	38,87
2.12.01.2.08.0004	**Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**	3.939.925.568,00	0	1.531.275.000,00	1.531.275.000,00	-2.408.650.568,00	38,87
2.12.01.2.08.0004.5.1	**BELANJA OPERASI**	3.939.925.568,00	0	1.531.275.000,00	1.531.275.000,00	-2.408.650.568,00	38,87
2.12.01.2.08.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.939.925.568,00	0	1.531.275.000,00	1.531.275.000,00	-2.408.650.568,00	38,87
2.12.01.2.08.0004.5.1.02.02	Belanja Jasa	3.939.925.568,00	0	1.531.275.000,00	1.531.275.000,00	-2.408.650.568,00	38,87
2.12.01.2.08.0004.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	3.914.000.000,00	0	1.522.500.000,00	1.522.500.000,00	-2.391.500.000,00	38,9
2.12.01.2.08.0004.5.1.02.02.01.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	8.000.000,00	0	2.000.000,00	2.000.000,00	-6.000.000,00	25
2.12.01.2.08.0004.5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	3.746.000.000,00	0	1.493.500.000,00	1.493.500.000,00	-2.252.500.000,00	39,87
2.12.01.2.08.0004.5.1.02.02.01.0045	Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan	15.000.000,00	0	0	0	-15.000.000,00	0
2.12.01.2.08.0004.5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan / Reklame, Film, dan Pemotretan	145.000.000,00	0	27.000.000,00	27.000.000,00	-118.000.000,00	18,62
2.12.01.2.08.0004.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan / Asuransi	25.925.568,00	0	8.775.000,00	8.775.000,00	-17.150.568,00	33,85
2.12.01.2.08.0004.5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	3.893.568,00	0	0	0	-3.893.568,00	0
2.12.01.2.08.0004.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	9.792.000,00	0	3.900.000,00	3.900.000,00	-5.892.000,00	39,83
2.12.01.2.08.0004.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	12.240.000,00	0	4.875.000,00	4.875.000,00	-7.365.000,00	39,83
2.12.01.2.09	**PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	595.869.908,00	0	215.561.234,00	215.561.234,00	-380.308.674,00	36,18
2.12.01.2.09.0002	**Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan**	514.869.908,00	0	134.561.234,00	134.561.234,00	-380.308.674,00	26,13
2.12.01.2.09.0002.5.1	**BELANJA OPERASI**	514.869.908,00	0	134.561.234,00	134.561.234,00	-380.308.674,00	26,13
2.12.01.2.09.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	514.869.908,00	0	134.561.234,00	134.561.234,00	-380.308.674,00	26,13
2.12.01.2.09.0002.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	514.869.908,00	0	134.561.234,00	134.561.234,00	-380.308.674,00	26,13
2.12.01.2.09.0002.5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	514.869.908,00	0	134.561.234,00	134.561.234,00	-380.308.674,00	26,13
2.12.01.2.09.0002.5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	137.676.000,00	0	30.391.000,00	30.391.000,00	-107.285.000,00	22,07
2.12.01.2.09.0002.5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	374.693.908,00	0	104.170.234,00	104.170.234,00	-270.523.674,00	27,8
2.12.01.2.09.0002.5.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	2.500.000,00	0	0	0	-2.500.000,00	0
2.12.01.2.09.0006	**Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya**	81.000.000,00	0	81.000.000,00	81.000.000,00	0	100
2.12.01.2.09.0006.5.1	**BELANJA OPERASI**	81.000.000,00	0	81.000.000,00	81.000.000,00	0	100

No	Uraian	Pagu Anggaran	Jumlah Realisasi (Rp.)			Lebih / (Kurang)	
			S/D Periode Lalu	Periode Ini	Total	(Rp.)	%
2.12.01.2.09.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	81.000.000,00	0	81.000.000,00	81.000.000,00	0	100
2.12.01.2.09.0006.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	81.000.000,00	0	81.000.000,00	81.000.000,00	0	100
2.12.01.2.09.0006.5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	81.000.000,00	0	81.000.000,00	81.000.000,00	0	100
2.12.01.2.09.0006.5.1.02.03.02.0115	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	11.700.000,00	0	11.700.000,00	11.700.000,00	0	100
2.12.01.2.09.0006.5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	32.500.000,00	0	32.500.000,00	32.500.000,00	0	100
2.12.01.2.09.0006.5.1.02.03.02.0404	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	36.800.000,00	0	36.800.000,00	36.800.000,00	0	100
2.12.02	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	8.532.136.550,00	0	160.074.500,00	160.074.500,00	-8.372.062.050,00	1,88
2.12.02.2.01	**PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK**	337.758.550,00	0	156.132.500,00	156.132.500,00	-181.626.050,00	46,23
2.12.02.2.01.0001	**Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan**	72.000.000,00	0	60.000.000,00	60.000.000,00	-12.000.000,00	83,33
2.12.02.2.01.0001.5.1	**BELANJA OPERASI**	72.000.000,00	0	60.000.000,00	60.000.000,00	-12.000.000,00	83,33
2.12.02.2.01.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	72.000.000,00	0	60.000.000,00	60.000.000,00	-12.000.000,00	83,33
2.12.02.2.01.0001.5.1.02.02	Belanja Jasa	72.000.000,00	0	60.000.000,00	60.000.000,00	-12.000.000,00	83,33
2.12.02.2.01.0001.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	72.000.000,00	0	60.000.000,00	60.000.000,00	-12.000.000,00	83,33
2.12.02.2.01.0001.5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	72.000.000,00	0	60.000.000,00	60.000.000,00	-12.000.000,00	83,33
2.12.02.2.01.0003	**Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk**	37.326.250,00	0	0	0	-37.326.250,00	0
2.12.02.2.01.0003.5.1	**BELANJA OPERASI**	37.326.250,00	0	0	0	-37.326.250,00	0
2.12.02.2.01.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.326.250,00	0	0	0	-37.326.250,00	0
2.12.02.2.01.0003.5.1.02.01	Belanja Barang	2.604.250,00	0	0	0	-2.604.250,00	0
2.12.02.2.01.0003.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2.604.250,00	0	0	0	-2.604.250,00	0
2.12.02.2.01.0003.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.604.250,00	0	0	0	-2.604.250,00	0
2.12.02.2.01.0003.5.1.02.02	Belanja Jasa	34.722.000,00	0	0	0	-34.722.000,00	0
2.12.02.2.01.0003.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	1.800.000,00	0	0	0	-1.800.000,00	0
2.12.02.2.01.0003.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.800.000,00	0	0	0	-1.800.000,00	0
2.12.02.2.01.0003.5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	32.922.000,00	0	0	0	-32.922.000,00	0
2.12.02.2.01.0003.5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	32.922.000,00	0	0	0	-32.922.000,00	0
2.12.02.2.01.0004	**Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk**	141.732.300,00	0	36.132.500,00	36.132.500,00	-105.599.800,00	25,49
2.12.02.2.01.0004.5.1	**BELANJA OPERASI**	141.732.300,00	0	36.132.500,00	36.132.500,00	-105.599.800,00	25,49
2.12.02.2.01.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	141.732.300,00	0	36.132.500,00	36.132.500,00	-105.599.800,00	25,49
2.12.02.2.01.0004.5.1.02.01	Belanja Barang	141.732.300,00	0	36.132.500,00	36.132.500,00	-105.599.800,00	25,49
2.12.02.2.01.0004.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	141.732.300,00	0	36.132.500,00	36.132.500,00	-105.599.800,00	25,49
2.12.02.2.01.0004.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	26.100.300,00	0	10.436.500,00	10.436.500,00	-15.663.800,00	39,99
2.12.02.2.01.0004.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	115.632.000,00	0	25.696.000,00	25.696.000,00	-89.936.000,00	22,22
2.12.02.2.01.0006	**Pencatatan Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan**	86.700.000,00	0	60.000.000,00	60.000.000,00	-26.700.000,00	69,2
2.12.02.2.01.0006.5.1	**BELANJA OPERASI**	86.700.000,00	0	60.000.000,00	60.000.000,00	-26.700.000,00	69,2
2.12.02.2.01.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	86.700.000,00	0	60.000.000,00	60.000.000,00	-26.700.000,00	69,2
2.12.02.2.01.0006.5.1.02.01	Belanja Barang	26.700.000,00	0	0	0	-26.700.000,00	0
2.12.02.2.01.0006.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	26.700.000,00	0	0	0	-26.700.000,00	0
2.12.02.2.01.0006.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	26.700.000,00	0	0	0	-26.700.000,00	0
2.12.02.2.01.0006.5.1.02.02	Belanja Jasa	60.000.000,00	0	60.000.000,00	60.000.000,00	0	100
2.12.02.2.01.0006.5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	60.000.000,00	0	60.000.000,00	60.000.000,00	0	100
2.12.02.2.01.0006.5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	60.000.000,00	0	60.000.000,00	60.000.000,00	0	100
2.12.02.2.02	**PENATAAN PENDAFTARAN PENDUDUK**	8.187.500.000,00	0	0	0	-8.187.500.000,00	0
2.12.02.2.02.0002	**Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan**	8.187.500.000,00	0	0	0	-8.187.500.000,00	0
2.12.02.2.02.0002.5.1	**BELANJA OPERASI**	8.187.500.000,00	0	0	0	-8.187.500.000,00	0

No	Uraian	Pagu Anggaran	Jumlah Realisasi (Rp.)			Lebih / (Kurang)	
			S/D Periode Lalu	Periode Ini	Total	(Rp.)	%
2.12.02.2.02.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	187.500.000,00	0	0	0	-187.500.000,00	0
2.12.02.2.02.0002.5.1.02.01	Belanja Barang	187.500.000,00	0	0	0	-187.500.000,00	0
2.12.02.2.02.0002.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	187.500.000,00	0	0	0	-187.500.000,00	0
2.12.02.2.02.0002.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	187.500.000,00	0	0	0	-187.500.000,00	0
2.12.02.2.02.0002.5.1.05	Belanja Hibah	8.000.000.000,00	0	0	0	-8.000.000.000,00	0
2.12.02.2.02.0002.5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	8.000.000.000,00	0	0	0	-8.000.000.000,00	0
2.12.02.2.02.0002.5.1.05.01.01	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	8.000.000.000,00	0	0	0	-8.000.000.000,00	0
2.12.02.2.02.0002.5.1.05.01.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	8.000.000.000,00	0	0	0	-8.000.000.000,00	0
2.12.02.2.03	**PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK**	6.878.000,00	0	3.942.000,00	3.942.000,00	-2.936.000,00	57,31
2.12.02.2.03.0004	**Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk**	6.878.000,00	0	3.942.000,00	3.942.000,00	-2.936.000,00	57,31
2.12.02.2.03.0004.5.1	**BELANJA OPERASI**	6.878.000,00	0	3.942.000,00	3.942.000,00	-2.936.000,00	57,31
2.12.02.2.03.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.878.000,00	0	3.942.000,00	3.942.000,00	-2.936.000,00	57,31
2.12.02.2.03.0004.5.1.02.01	Belanja Barang	6.878.000,00	0	3.942.000,00	3.942.000,00	-2.936.000,00	57,31
2.12.02.2.03.0004.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	6.878.000,00	0	3.942.000,00	3.942.000,00	-2.936.000,00	57,31
2.12.02.2.03.0004.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.424.000,00	0	0	0	-1.424.000,00	0
2.12.02.2.03.0004.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.454.000,00	0	3.942.000,00	3.942.000,00	-1.512.000,00	72,28
2.12.03	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	165.920.000,00	0	103.615.040,00	103.615.040,00	-62.304.960,00	62,45
2.12.03.2.01	**PELAYANAN PENCATATAN SIPIL**	165.920.000,00	0	103.615.040,00	103.615.040,00	-62.304.960,00	62,45
2.12.03.2.01.0001	**Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting**	165.920.000,00	0	103.615.040,00	103.615.040,00	-62.304.960,00	62,45
2.12.03.2.01.0001.5.1	**BELANJA OPERASI**	165.920.000,00	0	103.615.040,00	103.615.040,00	-62.304.960,00	62,45
2.12.03.2.01.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	165.920.000,00	0	103.615.040,00	103.615.040,00	-62.304.960,00	62,45
2.12.03.2.01.0001.5.1.02.01	Belanja Barang	110.720.000,00	0	48.415.040,00	48.415.040,00	-62.304.960,00	43,73
2.12.03.2.01.0001.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	110.720.000,00	0	48.415.040,00	48.415.040,00	-62.304.960,00	43,73
2.12.03.2.01.0001.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	25.675.000,00	0	15.930.040,00	15.930.040,00	-9.744.960,00	62,04
2.12.03.2.01.0001.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	85.045.000,00	0	32.485.000,00	32.485.000,00	-52.560.000,00	38,2
2.12.03.2.01.0001.5.1.02.02	Belanja Jasa	55.200.000,00	0	55.200.000,00	55.200.000,00	0	100
2.12.03.2.01.0001.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	2.100.000,00	0	2.100.000,00	2.100.000,00	0	100
2.12.03.2.01.0001.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.100.000,00	0	2.100.000,00	2.100.000,00	0	100
2.12.03.2.01.0001.5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	53.100.000,00	0	53.100.000,00	53.100.000,00	0	100
2.12.03.2.01.0001.5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	53.100.000,00	0	53.100.000,00	53.100.000,00	0	100
2.12.04	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	837.577.500,00	0	173.400.000,00	173.400.000,00	-664.177.500,00	20,7
2.12.04.2.01	**PENGUMPULAN DATA KEPENDUDUKAN DAN PEMANFAATAN DAN PENYAJIAN DATABASE KEPENDUDUKAN**	99.810.360,00	0	8.760.000,00	8.760.000,00	-91.050.360,00	8,78
2.12.04.2.01.0002	**Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan**	99.810.360,00	0	8.760.000,00	8.760.000,00	-91.050.360,00	8,78
2.12.04.2.01.0002.5.1	**BELANJA OPERASI**	99.810.360,00	0	8.760.000,00	8.760.000,00	-91.050.360,00	8,78
2.12.04.2.01.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.810.360,00	0	8.760.000,00	8.760.000,00	-91.050.360,00	8,78
2.12.04.2.01.0002.5.1.02.01	Belanja Barang	36.930.360,00	0	8.760.000,00	8.760.000,00	-28.170.360,00	23,72
2.12.04.2.01.0002.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	36.930.360,00	0	8.760.000,00	8.760.000,00	-28.170.360,00	23,72
2.12.04.2.01.0002.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	18.315.360,00	0	0	0	-18.315.360,00	0
2.12.04.2.01.0002.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	18.615.000,00	0	8.760.000,00	8.760.000,00	-9.855.000,00	47,06
2.12.04.2.01.0002.5.1.02.02	Belanja Jasa	62.880.000,00	0	0	0	-62.880.000,00	0
2.12.04.2.01.0002.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	2.700.000,00	0	0	0	-2.700.000,00	0
2.12.04.2.01.0002.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.700.000,00	0	0	0	-2.700.000,00	0
2.12.04.2.01.0002.5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	60.180.000,00	0	0	0	-60.180.000,00	0

No	Uraian	Pagu Anggaran	Jumlah Realisasi (Rp.)			Lebih / (Kurang)	
			S/D Periode Lalu	Periode Ini	Total	(Rp.)	%
2.12.04.2.01.0002.5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	60.180.000,00	0	0	0	-60.180.000,00	0
2.12.04.2.02	**PENATAAN PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	19.930.000,00	0	16.280.000,00	16.280.000,00	-3.650.000,00	81,69
2.12.04.2.02.0001	**Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	19.930.000,00	0	16.280.000,00	16.280.000,00	-3.650.000,00	81,69
2.12.04.2.02.0001.5.1	**BELANJA OPERASI**	19.930.000,00	0	16.280.000,00	16.280.000,00	-3.650.000,00	81,69
2.12.04.2.02.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.930.000,00	0	16.280.000,00	16.280.000,00	-3.650.000,00	81,69
2.12.04.2.02.0001.5.1.02.01	Belanja Barang	4.080.000,00	0	430.000,00	430.000,00	-3.650.000,00	10,54
2.12.04.2.02.0001.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	4.080.000,00	0	430.000,00	430.000,00	-3.650.000,00	10,54
2.12.04.2.02.0001.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	430.000,00	0	430.000,00	430.000,00	0	100
2.12.04.2.02.0001.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.650.000,00	0	0	0	-3.650.000,00	0
2.12.04.2.02.0001.5.1.02.02	Belanja Jasa	15.850.000,00	0	15.850.000,00	15.850.000,00	0	100
2.12.04.2.02.0001.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	2.100.000,00	0	2.100.000,00	2.100.000,00	0	100
2.12.04.2.02.0001.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.100.000,00	0	2.100.000,00	2.100.000,00	0	100
2.12.04.2.02.0001.5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	13.750.000,00	0	13.750.000,00	13.750.000,00	0	100
2.12.04.2.02.0001.5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	13.750.000,00	0	13.750.000,00	13.750.000,00	0	100
2.12.04.2.03	**PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	646.162.140,00	0	148.360.000,00	148.360.000,00	-497.802.140,00	22,96
2.12.04.2.03.0003	**Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	413.475.000,00	0	102.000.000,00	102.000.000,00	-311.475.000,00	24,67
2.12.04.2.03.0003.5.1	**BELANJA OPERASI**	413.475.000,00	0	102.000.000,00	102.000.000,00	-311.475.000,00	24,67
2.12.04.2.03.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	413.475.000,00	0	102.000.000,00	102.000.000,00	-311.475.000,00	24,67
2.12.04.2.03.0003.5.1.02.01	Belanja Barang	5.475.000,00	0	0	0	-5.475.000,00	0
2.12.04.2.03.0003.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	5.475.000,00	0	0	0	-5.475.000,00	0
2.12.04.2.03.0003.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.475.000,00	0	0	0	-5.475.000,00	0
2.12.04.2.03.0003.5.1.02.02	Belanja Jasa	408.000.000,00	0	102.000.000,00	102.000.000,00	-306.000.000,00	25
2.12.04.2.03.0003.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	408.000.000,00	0	102.000.000,00	102.000.000,00	-306.000.000,00	25
2.12.04.2.03.0003.5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	60.000.000,00	0	27.000.000,00	27.000.000,00	-33.000.000,00	45
2.12.04.2.03.0003.5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	0	0	0	0	0	0
2.12.04.2.03.0003.5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan / Reklame, Film, dan Pemotretan	48.000.000,00	0	0	0	-48.000.000,00	0
2.12.04.2.03.0003.5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat / Faksimili / Internet / TV Berlangganan	300.000.000,00	0	75.000.000,00	75.000.000,00	-225.000.000,00	25
2.12.04.2.03.0005	**Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	78.417.140,00	0	46.360.000,00	46.360.000,00	-32.057.140,00	59,12
2.12.04.2.03.0005.5.1	**BELANJA OPERASI**	78.417.140,00	0	46.360.000,00	46.360.000,00	-32.057.140,00	59,12
2.12.04.2.03.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	78.417.140,00	0	46.360.000,00	46.360.000,00	-32.057.140,00	59,12
2.12.04.2.03.0005.5.1.02.01	Belanja Barang	38.390.000,00	0	37.960.000,00	37.960.000,00	-430.000,00	98,88
2.12.04.2.03.0005.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	38.390.000,00	0	37.960.000,00	37.960.000,00	-430.000,00	98,88
2.12.04.2.03.0005.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	430.000,00	0	0	0	-430.000,00	0
2.12.04.2.03.0005.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	37.960.000,00	0	37.960.000,00	37.960.000,00	0	100
2.12.04.2.03.0005.5.1.02.02	Belanja Jasa	40.027.140,00	0	8.400.000,00	8.400.000,00	-31.627.140,00	20,99
2.12.04.2.03.0005.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	40.027.140,00	0	8.400.000,00	8.400.000,00	-31.627.140,00	20,99
2.12.04.2.03.0005.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	8.400.000,00	0	8.400.000,00	8.400.000,00	0	100
2.12.04.2.03.0005.5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan / Reklame, Film, dan Pemotretan	31.627.140,00	0	0	0	-31.627.140,00	0
2.12.04.2.03.0005.5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	0	0	0	0	0	0
2.12.04.2.03.0005.5.1.02.02.05.0030	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0	0	0	0	0	0

No	Uraian	Pagu Anggaran	Jumlah Realisasi (Rp.)			Lebih / (Kurang)	
			S/D Periode Lalu	Periode Ini	Total	(Rp.)	%
2.12.04.2.03.0007	**Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat**	154.270.000,00	0	0	0	-154.270.000,00	0
2.12.04.2.03.0007.5.1	**BELANJA OPERASI**	154.270.000,00	0	0	0	-154.270.000,00	0
2.12.04.2.03.0007.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	154.270.000,00	0	0	0	-154.270.000,00	0
2.12.04.2.03.0007.5.1.02.01	Belanja Barang	124.270.000,00	0	0	0	-124.270.000,00	0
2.12.04.2.03.0007.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	124.270.000,00	0	0	0	-124.270.000,00	0
2.12.04.2.03.0007.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	117.700.000,00	0	0	0	-117.700.000,00	0
2.12.04.2.03.0007.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.570.000,00	0	0	0	-6.570.000,00	0
2.12.04.2.03.0007.5.1.02.02	Belanja Jasa	30.000.000,00	0	0	0	-30.000.000,00	0
2.12.04.2.03.0007.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	30.000.000,00	0	0	0	-30.000.000,00	0
2.12.04.2.03.0007.5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan / Reklame, Film, dan Pemotretan	30.000.000,00	0	0	0	-30.000.000,00	0
2.12.04.2.04	**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	71.675.000,00	0	0	0	-71.675.000,00	0
2.12.04.2.04.0001	**Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	20.475.000,00	0	0	0	-20.475.000,00	0
2.12.04.2.04.0001.5.1	**BELANJA OPERASI**	20.475.000,00	0	0	0	-20.475.000,00	0
2.12.04.2.04.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.475.000,00	0	0	0	-20.475.000,00	0
2.12.04.2.04.0001.5.1.02.01	Belanja Barang	5.475.000,00	0	0	0	-5.475.000,00	0
2.12.04.2.04.0001.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	5.475.000,00	0	0	0	-5.475.000,00	0
2.12.04.2.04.0001.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.475.000,00	0	0	0	-5.475.000,00	0
2.12.04.2.04.0001.5.1.02.02	Belanja Jasa	15.000.000,00	0	0	0	-15.000.000,00	0
2.12.04.2.04.0001.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00	0	0	0	-15.000.000,00	0
2.12.04.2.04.0001.5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	15.000.000,00	0	0	0	-15.000.000,00	0
2.12.04.2.04.0003	**Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan**	51.200.000,00	0	0	0	-51.200.000,00	0
2.12.04.2.04.0003.5.1	**BELANJA OPERASI**	51.200.000,00	0	0	0	-51.200.000,00	0
2.12.04.2.04.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.200.000,00	0	0	0	-51.200.000,00	0
2.12.04.2.04.0003.5.1.02.01	Belanja Barang	17.350.000,00	0	0	0	-17.350.000,00	0
2.12.04.2.04.0003.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	17.350.000,00	0	0	0	-17.350.000,00	0
2.12.04.2.04.0003.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.290.000,00	0	0	0	-1.290.000,00	0
2.12.04.2.04.0003.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	16.060.000,00	0	0	0	-16.060.000,00	0
2.12.04.2.04.0003.5.1.02.02	Belanja Jasa	33.850.000,00	0	0	0	-33.850.000,00	0
2.12.04.2.04.0003.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	6.900.000,00	0	0	0	-6.900.000,00	0
2.12.04.2.04.0003.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	6.900.000,00	0	0	0	-6.900.000,00	0
2.12.04.2.04.0003.5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	26.950.000,00	0	0	0	-26.950.000,00	0
2.12.04.2.04.0003.5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	26.950.000,00	0	0	0	-26.950.000,00	0
2.12.05	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	69.180.000,00	0	32.243.250,00	32.243.250,00	-36.936.750,00	46,61
2.12.05.2.01	**PENYUSUNAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	69.180.000,00	0	32.243.250,00	32.243.250,00	-36.936.750,00	46,61
2.12.05.2.01.0002	**Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain**	69.180.000,00	0	32.243.250,00	32.243.250,00	-36.936.750,00	46,61
2.12.05.2.01.0002.5.1	**BELANJA OPERASI**	69.180.000,00	0	32.243.250,00	32.243.250,00	-36.936.750,00	46,61
2.12.05.2.01.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	69.180.000,00	0	32.243.250,00	32.243.250,00	-36.936.750,00	46,61
2.12.05.2.01.0002.5.1.02.01	Belanja Barang	69.180.000,00	0	32.243.250,00	32.243.250,00	-36.936.750,00	46,61
2.12.05.2.01.0002.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	69.180.000,00	0	32.243.250,00	32.243.250,00	-36.936.750,00	46,61
2.12.05.2.01.0002.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	60.420.000,00	0	30.053.250,00	30.053.250,00	-30.366.750,00	49,74
2.12.05.2.01.0002.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.760.000,00	0	2.190.000,00	2.190.000,00	-6.570.000,00	25
	JUMLAH BELANJA DAERAH	39.490.854.887,00	0	10.982.861.655,00	10.982.861.655,00	-28.507.993.232,00	27,81

No	Uraian	Pagu Anggaran	Jumlah Realisasi (Rp.)			Lebih / (Kurang)	
			S/D Periode Lalu	Periode Ini	Total	(Rp.)	%
	SURPLUS / (DEFISIT)	-39.490.854.887,00	0	-10.982.861.655,00	-10.982.861.655,00	28.507.993.232,00	27,81
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	-39.490.854.887,00	0	-10.982.861.655,00	-10.982.861.655,00	28.507.993.232,00	27,81

Berdasarkan tabel bahwa dari total pagu anggaran APBD murni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang tahun 2025 sebesar Rp 26.590.199.936 hingga Triwulan II Tahun 2025 (1 Januari – 12 Juni 2025) telah terealisasi anggaran sebesar Rp13.703.094.720 atau 51,53%.

Pada bab III disampaikan terkait perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang tahun 2025. Adapun tabel rekapitulasi perubahan pendanaan rencana kerja tertuang dalam tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2
Rincinan Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2025

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				**27.296.576.052,00**	**41.333.640.489,00**	**39.244.869.039,00**	**11.948.292.987,00**				**31.519.722.898,00**
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**27.296.576.052,00**	**41.333.640.489,00**	**39.244.869.039,00**	**11.948.292.987,00**				**31.519.722.898,00**
2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**				**27.296.576.052,00**	**41.333.640.489,00**	**39.244.869.039,00**	**11.948.292.987,00**				**31.519.722.898,00**
2.12.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan**	**100 Persen**	**100 Persen**	**25.487.372.692,00**	**31.303.000.449,00**	**29.640.197.989,00**	**3.098.142.556,00**				**28.585.515.248,00**
2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	10 Dokumen	10 Dokumen	357.098.640,00	596.430.749,00	455.383.706,00	98.285.066,00				581.240.000,00
2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	7 Dokumen	227.098.640,00	353.199.610,00	307.833.020,00	80.734.380,00	Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		383.240.000,00
2.12.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan	65.000.000,00	115.721.139,00	68.793.670,00	3.793.670,00	Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		99.000.000,00
2.12.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025					
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	65.000.000,00	127.510.000,00	78.757.016,00	13.757.016,00	Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		99.000.000,00
2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah laporan keuangan*	2 Dokumen	2 Dokumen	18.001.732.052,00	19.250.170.264,00	18.668.355.206,00	666.623.154,00				19.796.275.248,00
2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/ bulan	12 Orang/ bulan	17.796.576.052,00	19.072.229.054,00	18.535.843.206,00	739.267.154,00	Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		19.576.275.248,00
2.12.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD											
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	12 Laporan	205.156.000,00	177.941.210,00	132.512.000,00	-72.644.000,00	Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		220.000.000,00
2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Pembinaan Pegawai*	1 Dokumen	1 Dokumen	540.000.000,00	369.837.000,00	275.563.000,00	-264.437.000,00				660.000.000,00
2.12.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi											
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	260 Orang	260 Orang	540.000.000,00	369.837.000,00	275.563.000,00	-264.437.000,00	Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		660.000.000,00
2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah*	8 Dokumen	8 Dokumen	2.198.018.000,00	6.550.766.960,00	5.401.200.601,00	3.203.182.601,00				2.233.000.000,00
2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025					
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	10.800.000,00	10.801.500,00	10.801.500,00	1.500,00	Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		17.000.000,00
2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	540.082.000,00	1.811.005.550,00	1.820.077.550,00	1.279.995.550,00	Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		560.000.000,00
2.12.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga											
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	54.000.000,00	50.736.000,00	50.736.000,00	-3.264.000,00	Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		87.000.000,00
2.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor											
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	1.080.000.000,00	3.911.454.350,00	3.023.663.821,00	1.943.663.821,00	Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1.100.000.000,00
2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan											
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	15 Paket	15 Paket	108.000.000,00	140.619.660,00	115.489.730,00	7.489.730,00	Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		110.000.000,00
2.12.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan											
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	3 Dokumen	27.000.000,00	27.002.900,00	31.545.000,00	4.545.000,00	Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		50.000.000,00
2.12.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu											
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	108.000.000,00	129.446.000,00	102.556.000,00	-5.444.000,00	Kab. Tangerang, Tigaraksa,	PENDAPATAN ASLI		29.000.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025					
									Kadu Agung	DAERAH (PAD)		
2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	270.136.000,00	469.701.000,00	246.331.000,00	-23.805.000,00	Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		280.000.000,00
2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia*	2 Dokumen	2 Dokumen	3.661.524.000,00	3.939.925.568,00	4.230.325.568,00	568.801.568,00				4.015.000.000,00
2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	5.760.000,00	0,00	0,00	-5.760.000,00	Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		15.000.000,00
2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	3.655.764.000,00	3.939.925.568,00	4.230.325.568,00	574.561.568,00	Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4.000.000.000,00
2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	3 Unit	3 Unit	729.000.000,00	595.869.908,00	609.369.908,00	-119.630.092,00				1.300.000.000,00
2.12.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025					
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	19 Unit	19 Unit	270.000.000,00	514.869.908,00	514.869.908,00	244.869.908,00	Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		500.000.000,00
2.12.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	50 Unit	81.000.000,00	81.000.000,00	94.500.000,00	13.500.000,00	Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		200.000.000,00
2.12.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	378.000.000,00	0,00	0,00	-378.000.000,00	Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		600.000.000,00
2.12.02	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	**Cakupan SKPWNI dan SKDWNI yang diterbitkan Cakupan kepemilikan KIA Cakupan Perekaman KTP-el**	**-**	**100% 60% 99.40 %**	**795.203.500,00**	**8.738.361.000,00**	**8.532.136.550,00**	**231.516.150,00**				**1.026.719.650,00**
2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	*Jumlah Dokumen Pelayanan Pendaftaran Penduduk*	9 Dokumen	9 Dokumen	559.182.000,00	479.093.000,00	337.758.550,00	-221.423.450,00				730.921.000,00
2.12.02.2.01.0001	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan											
		Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	16.500 Dokumen	16.500 Dokumen	217.994.000,00	144.000.000,00	72.000.000,00	-145.994.000,00	Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		239.793.000,00
2.12.02.2.01.0003	Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk											

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025					
		Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Pelayanan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	181 Orang	181 Orang	187.000.000,00	50.423.000,00	37.326.250,00	-149.673.750,00	Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		214.500.000,00
2.12.02.2.01.0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk											
		Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	1 Laporan	71.188.000,00	188.981.000,00	141.732.300,00	70.544.300,00	Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		141.328.000,00
2.12.02.2.01.0006	Pencatatan Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan											
		Jumlah Laporan Pencatatan Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	12 Laporan	12 Laporan	83.000.000,00	95.689.000,00	86.700.000,00	3.700.000,00	Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		135.300.000,00
2.12.02.2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk	*Jumlah Blanko KIA yang tersedia*	55.794 Dokumen	37.500 Dokumen	197.021.500,00	8.250.000.000,00	8.187.500.000,00	7.990.478.500,00				216.723.650,00
2.12.02.2.02.0002	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan											
		Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	30.311 Dokumen	30.311 Dokumen	197.021.500,00	8.250.000.000,00	8.187.500.000,00	7.990.478.500,00	Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		216.723.650,00
2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	*Jumlah Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan*	1 Dokumen	1 Dokumen	39.000.000,00	9.268.000,00	6.878.000,00	-32.122.000,00				79.075.000,00
2.12.02.2.03.0004	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk											

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025					
		Jumlah Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk yang Dimanfaatkan	6 Dokumen	6 Dokumen	39.000.000,00	9.268.000,00	6.878.000,00	-32.122.000,00	Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		79.075.000,00
2.12.03	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**Cakupan Kepemilikan Akte Kematian Cakupan Kepemilikan Akte Kelahiran**	**100% 99,50 %**	**100% 92.00 %**	**216.000.000,00**	**227.350.000,00**	**165.920.000,00**	**184.000.000,00**				**400.000.000,00**
2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	*Jumlah Laporan Pelayanan Pencatatan Sipil*	5 Laporan	5 Laporan	216.000.000,00	227.350.000,00	165.920.000,00	-50.080.000,00				400.000.000,00
2.12.03.2.01.0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting											
		Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	5 Dokumen	5 Dokumen	216.000.000,00	227.350.000,00	165.920.000,00	-50.080.000,00	Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		400.000.000,00
2.12.04	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	**Persentase Jaringan SIAK dalam Kondisi Baik**	**100 %**	**100 %**	**726.214.600,00**	**991.209.520,00**	**837.434.500,00**	**709.273.400,00**				**1.435.488.000,00**
2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	*Persentase Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan*	100 %	100 %	135.000.000,00	134.999.520,00	99.810.360,00	-35.189.640,00				165.000.000,00
2.12.04.2.01.0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan											
		Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	13 Dokumen	5 Dokumen	135.000.000,00	134.999.520,00	99.810.360,00	-35.189.640,00	Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		165.000.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025					
2.12.04.2.02	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	*Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan*	1 Dokumen	1 Dokumen	26.898.000,00	22.850.000,00	19.930.000,00	-6.968.000,00				29.488.000,00
2.12.04.2.02.0001	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan											
		Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	26.898.000,00	22.850.000,00	19.930.000,00	-6.968.000,00	Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		29.488.000,00
2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	*Terlaksananya Aktivasi Indentitas Kependudukan Digital (IKD)*	1 Laporan	1 Laporan	406.851.600,00	704.980.000,00	646.019.140,00	239.167.540,00				969.000.000,00
2.12.04.2.03.0003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan											
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan	1 Laporan	116.880.000,00	416.760.000,00	413.332.000,00	296.452.000,00	Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		602.000.000,00
2.12.04.2.03.0005	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan											
		Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan	1 Laporan	90.790.000,00	90.100.000,00	78.417.140,00	-12.372.860,00	Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		96.000.000,00
2.12.04.2.03.0007	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat											

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025					
		Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	1 Laporan	1 Laporan	199.181.600,00	198.120.000,00	154.270.000,00	-44.911.600,00	Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		271.000.000,00
2.12.04.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	*Meningkatnya Pengetahuan dan Pemahaman Pengelola SIAK Kecamatan dan Dinas terhadap Aplikasi dan Peraturan terbaru tentang SIAK*	2 Laporan	2 Laporan	157.465.000,00	128.380.000,00	71.675.000,00	-85.790.000,00				272.000.000,00
2.12.04.2.04.0001	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan											
		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	4 Laporan	4 Laporan	37.400.000,00	37.300.000,00	20.475.000,00	-16.925.000,00	Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		39.000.000,00
2.12.04.2.04.0003	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan											
		Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	4 Laporan	4 Laporan	120.065.000,00	91.080.000,00	51.200.000,00	-68.865.000,00	Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		233.000.000,00
2.12.05	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	**Persentase Pemenuhan Pengelolaan Profil Kependudukan**	**100 Persen**	**100 Persen**	**71.785.260,00**	**73.719.520,00**	**69.180.000,00**	**214.740,00**				**72.000.000,00**
2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	*Jumlah Dokumen Data Profil Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang*	1 Dokumen	1 Dokumen	71.785.260,00	73.719.520,00	69.180.000,00	-2.605.260,00				72.000.000,00
2.12.05.2.01.0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain											

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025					
		Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	2 Dokumen	2 Dokumen	71.785.260,00	73.719.520,00	69.180.000,00	-2.605.260,00	Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		72.000.000,00
J U M L A H					**27.296.576.052,00**	**41.333.640.489,00**	**39.244.869.039,00**	**1.284.717.462.164,00**				**31.519.722.898,00**

BAB IV

PENUTUP

Demikian Rencana Kerja Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang Tahun 2025 ini disusun berdasarkan tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang tertuang dalam Renstra yang dalam penyusunan program dan kegiatan diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tangerang sehingga Rencana Kerja Perubahan yang merupakan perencanaan satu tahun kedepan dan dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi masyarakat dan stakeholders (pihak yang terkait dan berkepentingan) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang.

Rencana kerja perubahan tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang merupakan dokumen perencanaan yang penting yang dipedomani sebagai arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan perubahan tahun 2025 di lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Namun demikian rencana kerja ini bukanlah dokumen yang bersifat kaku dan terbatas, melainkan dokumen yang fleksibel dan terbuka terhadap perubahan sesuai dengan pertimbangan kebutuhan program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang.

Diharapkan dengan penyusunan Rencana Kerja Perubahan ini menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan baik yang menjadi penjabaran atas Dokumen RPD Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026 maupun yang terkait dengan perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan pembangunan yang menjadi target kinerja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Banten dan Pemerintahan Pusat.

Untuk menjamin keberhasilan Rencana Kerja (Renja) Perubahan yang merupakan implementasi dari Rencana Startegis (Renstra) maka perlu dilakukan Langkah kaidah pelaksanaan sebagai berikut ini:

1. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di rencana kerja secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana kerja yang telah dibuat.
2. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana kerja untuk menjamin pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tangerang.
3. Rencana Kerja Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang selain menjadi pelaksanaan kegiatan tahun 2025 juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja dan sebagai bahan pelaksanaan kegiatan sehingga dapat diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renja Perubahan Tahun 2025, maka perlu dilaksanakan Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2025 yang selanjutnya dijadikan bahan bagi penyusunan Renja berikutnya.

Melalui Rencana Kerja (Renja) Perubahan ini diharapkan agar setiap aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang mampu melakukan tevaluasi guna meningkatkan capaian kinerja yang

lebih baik melalui pemahaman tugas dan meningkatkan pelaksanaannya dengan penuh tanggung jawab dan kerja keras.

Akhir kata, dengan tersusunnya Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang Tahun 2025 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian Misi Pemerintah Kabupaten Tangerang yaitu:

“Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik, Demokratis, dan Partisipatif”

Dengan mengharap keridhoan Allah Yang Maha Esa, semoga Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 yang telah dibuat bersama-sama ini dapat diwujudkan.

21. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perubahan Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan Perangkat Daerah, Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja Perubahan Perangkat Daerah menjadi dasar dalam menyusun rencana kegiatan dan anggaran serta mengukur kinerja pelayanan (SKPD);
2. Renja Perubahan Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah pada Tahun 2025.

Mengingat arti strategis dokumen Renja Perangkat Daerah dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja Perangkat Daerah harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, antara lain :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan;
2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan;
3. Program dan kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang;
4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Adapun Bagan Alur Tahapan Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah sebagimana tercamtum dalam gambar dibawah.

Tabel 1.1

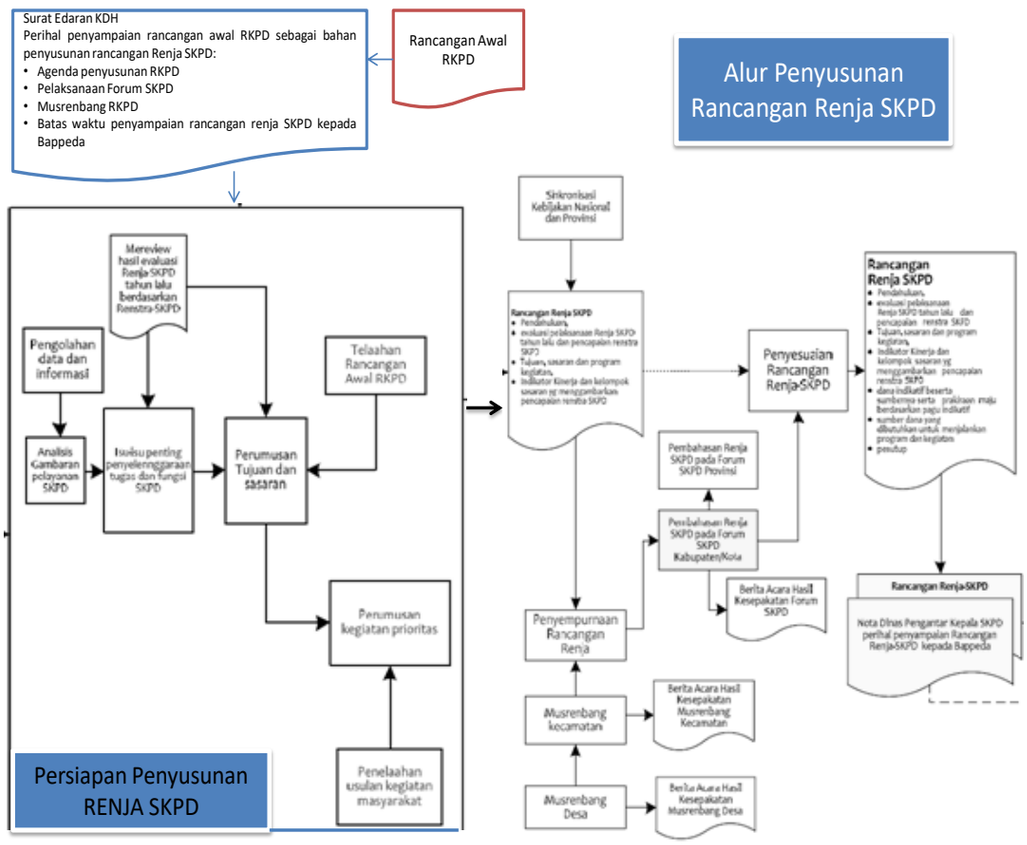

Rencana Pembangunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2024 – 2026, dengan empat misi yaitu :

Misi 1 : Mewujudkan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Tangerang yang mandiri, berdaya saing tinggi dan berakhlak mulia.

Misi 2 : Mewujudkan perekonomian daerah yang maju dan berdaya saing berbasis pada potensi keunggulan lokal.

Misi 3 : Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, demokratis dan partisipatif.

Misi 4 : Mewujudkan pelayanan dasar bagi masyarakat secara merata dan proporsional, serta pembangunan yang terpadu dan serasi dengan pendekatan pengembangan wilayah berbasis ekonomi dan ekologi.

Untuk merealisasikan RPD Kabupaten Tangerang tersebut di atas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mendukung pada misi kedua ” *Mewujudkan perekonomian daerah yang maju dan berdaya saing berbasis pada potensi keunggulan lokal.”*.

Untuk merealisasikan RPD dalam melaksanakan Sasaran dan Kebijakan Strategis tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang menyusun Rencana Kerja Tahun 2025 dengan mengacu pada tema RKPD Tahun 2025 : *Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.*

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan hukum dalam Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang Tahun 2025 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Karya menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 01 tahun 2022 Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O14 Nomor 80);;
10. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Beianja Daiam Peiaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
12. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

13. Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodetifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1147);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bapenas Nomor 2 Tahun 2024 tentang RKP Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 264);
17. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten 2023-2043 (Lembaran Daerah Nomor 1 Tahun 2023);
18. Peraturan Gubernur Banten 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Banten 2023-2026 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2022 Nomor 3);
19. Peraturan Gubernur Banten Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2024 Nomor 11);
20. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 12);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2022 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0222);
22. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 24 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang;
23. Peraturan Bupati Kabupaten Tangerang Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2023 Nomor 39);

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program / kegiatan Tahun 2023, dan perencanaan program / kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang Tahun 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang Tahun 2025, meliputi :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4. Review Terhadap Rancangan RKPD Kabupaten Tangerang

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025

Proses penyusunan suatu perencanaan erat kaitannya dengan proses evaluasi, dari hasil evaluasi dapat teridentifikasi dua hal yaitu sejauhmana proses perencanaan pembangunan dilaksanakan dan permasalahan-permasalahan yang menghambat pelaksanaan perencanaan pembangunan tersebut. Rencana Strategis (Renstra) DPMPD Tahun 2024 – 2026 yang memuat indikator keberhasilan suatu proses perencanaan pembangunan untuk kurun waktu 3 (tiga) tahun, dijadikan tolak ukur untuk menilai sejauhmana perencanaan pembangunan telah dilaksanakan. Terkait dengan Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja Ketersediaan Dokumen Perencanaan. Ketersediaan Dokumen Perencanaan sangat diperlukan untuk menjamin agar program/kegiatan pembangunan yang dilaksanakan dapat berjalan secara efektif, efisien dan tepat sasaran. Dokumen Perencanaan Daerah diantaranya terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Seluruh Dokumen Perencanaan tersebut, sampai dengan Tahun Anggaran 2025 telah dilaksanakan diantaranya Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tangerang Tahun 2025.

Berdasarkan hasil evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja DPMPD Kabupaten Tangerang Tahun 2025, pelaksanaan Kinerja DPMPD Kabupaten Tangerang pada Tahun Anggaran 2025 mengalami pergeseran sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Beianja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dari pagu senilai Rp. 48.525.151.892,- menjadi Rp. 46.608.235.692 atau berkurang sebesar Rp. 1.916.916.200,- pengurangan anggaran tersebut terdiri dari Belanja Perjalanan Dinas, Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak, Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Pantia, Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelakasanan Kegiatan dan Belanja Sewa Hotel. Adapun rincian anggaran pada penetapan APBD Pergeseran Tahun 2025 terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal dengan rincian sebagai berikut :

A. Belanja Operasi

Belanja Pegawai Tahun 2025 dialokasikan sebesar Rp. 8.723.515.150,- dan sampai dengan bulan mei sudah terealisasi sebesar Rp. 3.974.044.398,- (45,56%). Belanja Barang dan Jasa Tahun 2025 dialokasikan sebesar Rp. 14.351.471.542,- dan terealisasi sebesar Rp. 5.701.488.827,- (39,73%). Belanja Hibah Tahun 2025 dialokasikan sebesar Rp. 23.466.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 7.562.000.000,,- (32,23%)

B. Belanja Modal

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2025 dialokasikan sebesar Rp. 67.249.000,- dan sudah terealisasi sebesar Rp. 66.864.000,- (99,43%).

Program dan kegiatan DPMPD Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2025 terdiri dari 5 program, 11 kegiatan dan 43 sub kegiatan. Capaian kinerja fisik dan keuangan program/kegiatan/sub kegiatan tercantum dalam tabel berikut :

REALISASI FISIK DAN KEUANGAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN TANGERANG
TAHUN ANGGARAN 2025
Tabel 2.1

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Capaian (%)	Realisasi Fisik Kegiatan (%)	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Satuan	Target indikator	Realisasi Indikator	Capaian (%)	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5=(4/3)*100	6	7	8	9	10	11=(10/9)*100	12
2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**										
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.389.317.500	3.108.365.739	27.29 %	100.00 %	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	%	100	100	100.00 %	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	230.253.940	61.983.202	26.92 %	100.00 %	tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	dokumen	-	-	0.00 %	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
2.13.01.2.01.0001	*Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	73.279.650	42.419.430	57.89 %	100.00 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	2	2	100.00 %	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Capaian (%)	Realisasi Fisik Kegiatan (%)	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Satuan	Target indikator	Realisasi Indikator	Capaian (%)	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5=(4/3)*100	6	7	8	9	10	11=(10/9)*100	12
2.13.01.2.01.0006	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	32.648.000	8.162.000	25.00 %	100.00 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan	1	1	100.00 %	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
2.13.01.2.01.0007	*Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	124.326.290	11.401.772	9.17 %	100.00 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan	1	1	100.00 %	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.737.785.750	2.392.405.976	27.38 %	100.00 %	jumlah laporan keuangan	dokumen	2	2	100.00 %	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
2.13.01.2.02.0001	*Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	8.723.515.150	2.392.405.976	27.42 %	100.00 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	33	33	100.00 %	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
2.13.01.2.02.0005	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan*	14.270.600	0	0.00 %	0.00 %	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan	laporan	-		0.00 %	Dinas Pemberdayaan

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Capaian (%)	Realisasi Fisik Kegiatan (%)	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Satuan	Target indikator	Realisasi Indikator	Capaian (%)	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5=(4/3)*100	6	7	8	9	10	11=(10/9)*100	12
	Keuangan Akhir Tahun SKPD					Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					Masyarakat dan Pemerintahan Desa
2.13.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12.478.410	6.638.410	53.20 %	100.00 %	tersedianya dokumen Barang Milik Daerah	dokumen	2	2	100.00 %	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
2.13.01.2.03.0001	*Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD*	7.410.060	3.790.060	51.15 %	100.00 %	jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	dokumen	1	1	100.00 %	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
2.13.01.2.03.0005	*Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD*	5.068.350	2.848.350	56.20 %	100.00 %	jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunaan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan	1	1	100.00 %	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
2.13.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	301.626.400	45.000.000	14.92 %	100.00 %	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Orang	-	-	0.00 %	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Capaian (%)	Realisasi Fisik Kegiatan (%)	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Satuan	Target indikator	Realisasi Indikator	Capaian (%)	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5=(4/3)*100	6	7	8	9	10	11=(10/9)*100	12
2.13.01.2.05.0002	*Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya*	115.900.000	45.000.000	38.83 %	100.00 %	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	paket	60	60	100.00 %	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
2.13.01.2.05.0009	*Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi*	32.000.000	0	0.00 %	0.00 %	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	-		0.00 %	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
2.13.01.2.05.0011	*Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*	153.726.400	0	0.00 %	0.00 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	-		0.00 %	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	671.561.500	169.991.000	25.31 %	100.00 %	tersedianya dokumen layanan administrasi umum perangkat daerah	dokumen	4	4	100.00 %	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
2.13.01.2.06.0001	*Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*	26.482.000	0	0.00 %	0.00 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	-		0.00 %	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Capaian (%)	Realisasi Fisik Kegiatan (%)	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Satuan	Target indikator	Realisasi Indikator	Capaian (%)	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5=(4/3)*100	6	7	8	9	10	11=(10/9)*100	12
											Pemerintahan Desa
2.13.01.2.06.0002	*Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	67.997.000	0	0.00 %	0.00 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	-		0.00 %	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
2.13.01.2.06.0004	*Penyediaan Bahan Logistik Kantor*	132.552.500	117.042.000	88.30 %	100.00 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	1	1	100.00 %	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
2.13.01.2.06.0005	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	51.430.000	0	0.00 %	0.00 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket	-		0.00 %	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
2.13.01.2.06.0006	*Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan*	105.340.000	24.735.000	23.48 %	100.00 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dokumen	3	3	100.00 %	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
2.13.01.2.06.0008	*Fasilitasi Kunjungan Tamu*	107.850.000	18.750.000	17.39 %	100.00 %	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	laporan	1	1	100.00 %	Dinas Pemberdayaan Masyarakat

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Capaian (%)	Realisasi Fisik Kegiatan (%)	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Satuan	Target indikator	Realisasi Indikator	Capaian (%)	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5=(4/3)*100	6	7	8	9	10	11=(10/9)*100	12
											dan Pemerintahan Desa
2.13.01.2.06.0009	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	179.910.000	9.464.000	5.26 %	100.00 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	2	2	100.00 %	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	624.961.568	173.403.500	27.75 %	100.00 %	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jenis	6	6	100.00 %	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
2.13.01.2.08.0004	*Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	624.961.568	173.403.500	27.75 %	100.00 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	1	1	100.00 %	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	810.649.932	258.943.651	31.94 %	100.00 %	tersedianya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	jenis	3	3	100.00 %	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
2.13.01.2.09.0001	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan*	332.149.932	57.390.483	17.28 %	100.00 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Unit	9	9	100.00 %	Dinas Pemberdayaan

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Capaian (%)	Realisasi Fisik Kegiatan (%)	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Satuan	Target indikator	Realisasi Indikator	Capaian (%)	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5=(4/3)*100	6	7	8	9	10	11=(10/9)*100	12
	Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					Masyarakat dan Pemerintahan Desa
2.13.01.2.09.0006	*Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	85.500.000	6.000.000	7.02 %	100.00 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	10	10	100.00 %	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
2.13.01.2.09.0009	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*	196.500.000	195.553.168	99.52 %	100.00 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	100.00 %	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
2.13.01.2.09.0010	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	196.500.000	0	0.00 %	0.00 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	-		0.00 %	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	602.899.870	561.565.000	93.14 %	50.00 %	jumlah rekomendasi penataan desa	Jumlah	1	1	100.00 %	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	602.899.870	561.565.000	93.14 %	50.00 %	jumlah rekomendasi penataan desa	desa	-	-	0.00 %	Dinas Pemberdaya

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Capaian (%)	Realisasi Fisik Kegiatan (%)	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Satuan	Target indikator	Realisasi Indikator	Capaian (%)	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5=(4/3)*100	6	7	8	9	10	11=(10/9)*100	12
											an Masyarakat dan Pemerintahan Desa
2.13.02.2.01.0002	*Fasilitasi Tata Wilayah Desa*	41.210.880	0	0.00 %	0.00 %	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	desa	-		0.00 %	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
2.13.02.2.01.0003	*Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa*	561.688.990	561.565.000	99.98 %	100.00 %	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya	desa	-		0.00 %	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	591.478.240	280.330.250	47.39 %	50.00 %	Jumlah desa yang difasilitasi kerjasamanya	Desa	1	1	100.00 %	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa	591.478.240	280.330.250	47.39 %	50.00 %	Jumlah desa yang difasilitasi kerjasamanya	desa	-	-	0.00 %	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Capaian (%)	Realisasi Fisik Kegiatan (%)	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Satuan	Target indikator	Realisasi Indikator	Capaian (%)	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5=(4/3)*100	6	7	8	9	10	11=(10/9)*100	12
2.13.03.2.01.0001	*Fasilitasi Kerja Sama antar Desa dalam Kabupaten/Kota*	310.477.990	0	0.00 %	0.00 %	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Dokumen	-		0.00 %	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
2.13.03.2.01.0003	*Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan*	281.000.250	280.330.250	99.76 %	100.00 %	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	dokumen	-		0.00 %	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	7.464.957.962	955.820.412	12.80 %	100.00 %	Jumlah Desa Mandiri	Desa	-	-	0.00 %	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	7.464.957.962	955.820.412	12.80 %	100.00 %	jumlah desa mandiri	desa	-	-	0.00 %	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
2.13.04.2.01.0001	*Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa*	111.400.000	0	0.00 %	0.00 %	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	dokumen	-	-	0.00 %	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Capaian (%)	Realisasi Fisik Kegiatan (%)	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Satuan	Target indikator	Realisasi Indikator	Capaian (%)	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5=(4/3)*100	6	7	8	9	10	11=(10/9)*100	12
											Pemerintahan Desa
2.13.04.2.01.0002	*Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa*	151.578.750	0	0.00 %	0.00 %	Jumlah dokumen penyusunan produk hukum desa	dokumen	-		0.00 %	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
2.13.04.2.01.0003	*Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa*	130.822.500	0	0.00 %	0.00 %	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	dokumen	-		0.00 %	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
2.13.04.2.01.0004	*Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa*	6.310.085.712	955.820.412	15.15 %	100.00 %	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	dokumen	1	1	100.00 %	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
2.13.04.2.01.0005	*Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa*	61.645.000	0	0.00 %	0.00 %	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Orang	-		0.00 %	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
2.13.04.2.01.0006	*Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa*	27.005.000	0	0.00 %	0.00 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Musyawarah Desa	laporan	-		0.00 %	Dinas Pemberdayaan Masyarakat

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Capaian (%)	Realisasi Fisik Kegiatan (%)	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Satuan	Target indikator	Realisasi Indikator	Capaian (%)	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5=(4/3)*100	6	7	8	9	10	11=(10/9)*100	12
											dan Pemerintahan Desa
2.13.04.2.01.0007	*Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa*	115.642.500	0	0.00 %	0.00 %	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	dokumen	-		0.00 %	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
2.13.04.2.01.0008	*Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa*	39.548.500	0	0.00 %	0.00 %	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	dokumen	-		0.00 %	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
2.13.04.2.01.0013	*Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa*	90.962.500	0	0.00 %	0.00 %	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	dokumen	-		0.00 %	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
2.13.04.2.01.0014	*Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD*	61.702.500	0	0.00 %	0.00 %	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Orang	-		0.00 %	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
2.13.04.2.01.0016	*Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa*	199.687.000	0	0.00 %	0.00 %	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	laporan	-		0.00 %	Dinas Pemberdayaan

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Capaian (%)	Realisasi Fisik Kegiatan (%)	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Satuan	Target indikator	Realisasi Indikator	Capaian (%)	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5=(4/3)*100	6	7	8	9	10	11=(10/9)*100	12
											Masyarakat dan Pemerintahan Desa
2.13.04.2.01.0018	*Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan*	164.878.000	0	0.00 %	0.00 %	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	dokumen	-		0.00 %	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	26.559.582.120	2.951.119.850	11.11 %	80.00 %	Jumlah Desa yang Menghasilkan PADes	Desa	3	3	100.00 %	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
						Prosentase lembaga masyarakat yang difasilitasi	%	100	100	100.00 %	
2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	26.559.582.120	2.951.119.850	11.11 %	80.00 %	jumlah lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi	LKD	1	1	100.00 %	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
2.13.05.2.01.0002	*Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga*	23.690.764.680	2.521.000.000	10.64 %	100.00 %	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan	dokumen	1	1	100.00 %	Dinas Pemberdayaan Masyarakat

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Capaian (%)	Realisasi Fisik Kegiatan (%)	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Satuan	Target indikator	Realisasi Indikator	Capaian (%)	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5=(4/3)*100	6	7	8	9	10	11=(10/9)*100	12
	Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat					Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat					dan Pemerintahan Desa
2.13.05.2.01.0003	*Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat*	866.854.160	51.000.000	5.88 %	100.00 %	Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	lembaga	-		0.00 %	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
2.13.05.2.01.0005	*Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa*	223.638.740	0	0.00 %	0.00 %	Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	dokumen	-		0.00 %	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
2.13.05.2.01.0006	*Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna*	518.100.160	231.397.450	44.66 %	100.00 %	jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	laporan	1	1	100.00 %	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Capaian (%)	Realisasi Fisik Kegiatan (%)	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Satuan	Target indikator	Realisasi Indikator	Capaian (%)	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5=(4/3)*100	6	7	8	9	10	11=(10/9)*100	12
											Pemerintahan Desa
2.13.05.2.01.0009	*Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga*	1.260.224.380	147.722.400	11.72 %	100.00 %	jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	dokumen	1	1	100.00 %	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota merupakan program yang bertujuan untuk memastikan kelancaran urusan pemerintahan di tingkat lokal. Program ini memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 11.389.317.500 dan baru terealisasi sebesar Rp. 4.981.163.783 (43,74%).

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota memiliki 7 kegiatan dan 22 sub kegiatan yang berfokus pada beberapa aspek penting, yaitu:

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah: Kegiatan ini memastikan penyusunan dokumen perencanaan, koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja, serta evaluasi kinerja perangkat daerah. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah: Kegiatan ini memfasilitasi pelayanan administrasi keuangan di lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD), termasuk penyediaan gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN), serta koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah: Kegiatan ini mengelola aset daerah secara transparan dan akuntabel, termasuk penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah: Kegiatan ini meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan aparatur di lingkungan perangkat daerah, termasuk pengadaan pakaian dinas, pendidikan dan pelatihan pegawai, serta bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan. Administrasi Umum Perangkat Daerah: Kegiatan ini memastikan kelancaran operasional dan pelayanan administratif di lingkungan perkantoran, termasuk penyediaan komponen instalasi listrik, penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, penyediaan barang cetakan, dan fasilitasi kunjungan tamu. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah: Kegiatan ini menyediakan berbagai jasa penunjang yang diperlukan untuk mendukung efisiensi dan efektivitas urusan pemerintahan daerah, termasuk penyediaan jasa surat menyurat dan penyediaan jasa pelayanan umum kantor. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah: Kegiatan ini memastikan kelangsungan dan kesiapan sarana serta prasarana aparatur daerah, termasuk pemeliharaan kendaraan dinas, peralatan dan mesin lainnya, serta gedung kantor dan bangunan lainnya.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota telah menunjukkan pencapaian yang baik dalam beberapa aspek, seperti: terpenuhinya target indikator program, pengelolaan aset daerah yang transparan dan akuntabel, peningkatan kapasitas dan kesejahteraan aparatur, kelancaran operasional dan pelayanan administratif. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kendala yang perlu diatasi, belum terealisasinya sub kegiatan "Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi", perlunya pemantauan dan evaluasi yang cermat terhadap pelaksanaan kegiatan.

Dalam memastikan kelancaran urusan pemerintahan di tingkat lokal. Program ini telah menunjukkan pencapaian yang baik, namun masih terdapat beberapa kendala yang perlu diatasi. Diharapkan dengan evaluasi dan perbaikan yang berkelanjutan, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dapat

semakin optimal dalam mendukung kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Program Administrasi Pemerintahan Desa di Kabupaten Tangerang bertujuan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa serta mendorong kemajuan desa-desa di wilayah tersebut. Dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang, program ini memiliki anggaran sebesar Rp. 7.464.957.962 Program ini terdiri dari dua belas sub kegiatan, yaitu: fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, fasilitasi penyusunan produk hukum desa, fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan desa, Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa, Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa, Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa, Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa, Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa, Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa, Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD, Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa, serta Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan.

Sampai dengan akhir triwulan I TA 2025 Program ini baru dapat merealisasikan anggaran sebesar Rp. 4.756.699.970 atau sebesar 36,28%, dikarenakan beberapa sub kegiatan akan di realisasikan pada triwulan berikutnya sesuai anggaran kas. Secara keseluruhan, Program Administrasi Pemerintahan Desa telah menunjukkan hasil positif dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa dan mendorong kemajuan desa-desa di Kabupaten Tangerang. Untuk memastikan program ini semakin optimal, perlu dilakukan beberapa langkah perbaikan. Disarankan agar pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan terus ditingkatkan, koordinasi dan sinergi antar pemangku kepentingan diperkuat, kapasitas aparatur desa lebih ditingkatkan, serta dilakukan inovasi dan pengembangan program secara berkelanjutan. Dengan demikian, Program Administrasi Pemerintahan Desa diharapkan dapat semakin efektif dalam mendukung kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Tangerang bertujuan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa dan mendorong kemajuan desa-desa di wilayah tersebut. Program ini dilaksanakan oleh Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 26.559.582.120,- Program ini terbagi menjadi lima sub kegiatan: fasilitasi penataan, pemberdayaan, dan pendayagunaan kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna); peningkatan kapasitas kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan, lembaga adat desa/kelurahan, dan masyarakat hukum adat; fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah desa; fasilitasi pemerintah desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna (TTG); dan fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga.

Sampai dengan akhir triwulan I TA 2025 Program ini telah mencapai beberapa capaian signifikan, termasuk realisasi anggaran sebesar Rp. 8.462.680.200,- atau 31,86% terpenuhinya target indikator program dan kegiatan. setiap aspek program ini menunjukkan bahwa keberhasilan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat tidak hanya bergantung pada pelatihan dan pendampingan saja, tetapi juga pada komitmen semua pihak untuk berkolaborasi. Keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap tahap program, mulai dari perencanaan hingga evaluasi, menjadi kunci untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam hal ini, penting bagi pemerintah untuk memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhan mereka, sehingga program yang dijalankan benar-benar relevan dengan kondisi di lapangan.

Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Tangerang memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa dan mendorong kemajuan desa-desa di wilayah tersebut. Dengan memberdayakan lembaga-lembaga ini, program ini tidak hanya menciptakan perubahan di tingkat lokal tetapi juga berkontribusi pada pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Keberhasilan program ini sangat bergantung pada kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga-lembaga yang ada, serta komitmen semua pihak untuk menjaga keberlanjutan dan relevansi program.

Sebagai saran untuk perbaikan ke depan, penting bagi program ini untuk terus melakukan evaluasi dan adaptasi terhadap kebutuhan masyarakat yang dinamis. Pengumpulan data yang akurat dan partisipatif akan membantu dalam merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran. Selain itu, peningkatan kapasitas fasilitator dan pendamping juga sangat penting agar mereka dapat memberikan dukungan yang lebih efektif kepada masyarakat. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan program pemberdayaan ini dapat memberikan dampak yang lebih signifikan dan berkelanjutan bagi masyarakat di Kabupaten Tangerang.

Secara keseluruhan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang telah merealisasi anggaran program dan kegiatan/sub kegiatan sampai dengan Triwulan I Tahun Anggaran 2025 sebesar 37,13%, terdapat rencana perubahan kegiatan dan anggaran pada RKPD Perubahan tahun 2025. Namun proyeksi pelaksaan kegiatan sampai dengan akhir tahun anggaran 2025 optimis tercapai 100% serta tetap memperhatikan efektifitas dan efesiensi anggaran.

Berdasarkan evaluasi kegiatan sampai dengan triwulan I Tahun Anggaran 2025 maupun perkiraan capaian sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di DPMPD Kabupaten Tangerang adalah sebagai berikut :

a. Masih perlunya penyelarasan kegiatan untuk mendukung pencapaian kinerja indikator outcome sesuai tujuan dan sasaran yang belum tercapai dalam Renstra Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026;
b. Masih perlunya peningkatan efektifitas dan efisiensi anggaran;

Dalam mengatasi permasalahan yang ada, maka pada Tahun 2025 DPMPD Kabupaten Tangerang menyusun strategi :

a. Meningkatkan Kinerja Perencanaan, Keuangan dan aset.
   Strategi ini diarahkan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja dalam bentuk nilai SAKIP SKPD sesuai dengan target yang ditetapkan, meliputi peningkatan dalam hal perencanaan, akuntabilitas pengelolaan keuangan dan manajemen aset.
b. Meningkatkan pemanfaataan IT.
   Strategi ini diarahkan untuk menerapkan penggunaan sistem informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan (SPBE) terutama dalam pengelolaan data, pemberian layanan dan pengelolaan pengaduan.
c. Meningkatkan Manajemen ASN.
   Strategi ini diarahkan untuk meningkatkan kompetensi pegawai lingkup DPMPD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai tujuan dan sasaran organisasi yang tertuang dalam Renstra.

Adapun arah kebijakan strategis DPMPD Tahun 2025 sebagai berikut :

- Mengoptimalkan pemanfaatan dan pengembangan teknologi informasi sistem perencanaan dan penganggaran
- Meningkatkan sistem pengelolaan belanja dan pendapatan daerah yang terintegrasi
- Meningkatkan sistem management asset daerah dan pengamanan asset daerah
- Mengembangkan aplikasi terintegrasi antar sector
- Meningkatkan Kinerja SKPD
- Implementasi Kebijakan Manajemen ASN dalam pengembangan kapasitas dan karir aparatur

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Tangerang merupakan Unsur Pelaksana Urusan Pemerintahan, berdasarkan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 24 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang mempunyai tugas membantu Bupati merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Dinas mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
3. Pembinaan dan koordinasi dengan instansi/lembaga lain terkait di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
4. Pengawasan dan pengendalian di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
5. Pelaksanaan pengkajian, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

Adapun rincian Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

a. Merumuskan bahan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan Desa;
b. Mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
c. Melaksanakan pembinaan dan koordinasi dengan instansi/lembaga lain terkait di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
d. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
e. Melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
f. Mengkaji dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas;
g. Melaporkan pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka akuntabilitas kinerja;
h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

2. Sekretariat Dinas

Sekretariat Dinas mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian tugas kesekretariatan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas Sekretariat Dinas mempunyai fungsi :

a. Penyiapan rumusan kebijakan teknis yang berkaitan dengan umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan;
b. Penyiapan rencana dan program yang berkaitan dengan umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan;
c. Penyiapan pengendalian yang berkaitan dengan umum dan kepegawaian, keuangan dan perencanaan;
d. Penyiapan bimbingan yang berkaitan dengan umum dan kepegawaian, keuangan dan perencanaan;
e. Pengelolaan administrasi yang berkaitan dengan umum dan kepegawaian, keuangan dan perencanaan;
f. Penyiapan fasilitasi pengelola informasi dan dokumentasi;
g. Penyiapan dan pelaksanaan pengembangan *e-government*;
h. Penyiapan bahan pemenuhan program aplikasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah secara elektronik;
i. Pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah; dan
j. Pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

Dalam melaksanakan fungsi Sekretaris Dinas mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

a. Merencanakan perumusan kebijakan teknis yang terkait dengan perencanaan dan keuangan, umum dan kepegawaian;
b. Membagi tugas program yang terkait dengan umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan;
c. Memberi petunjuk program yang terkait dengan umum dan kepegawaian, keuangan dan perencanaan;
d. Mengatur program yang terkait dengan umum dan kepegawaian, keuangan dan perencanaan;
e. Mengendalikan mutu bahan rencana pembangunan jangka menengah Daerah dan rencana strategis dalam bidang kepegawaian Daerah sebagai bahan penyusun rencana pembangunan rencana pembangunan jangka menengah Daerah, dan rencana strategis Daerah;
f. Mengendalikan mutu rencana kerja dan anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran DPMPD;
g. Mengendalikan mutu dan mengolah bahan evaluasi program dan kegiatan DPMPD;
h. Mereviu dan mengendalikan mutu laporan kinerja instansi pemerintah;
i. Mengatur pemenuhan program aplikasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah secara elektronik;
j. Merumuskan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja DPMPD;
k. Mengatur administrasi barang milik Daerah pada DPMPD;
l. Mengatur administrasi kepegawaian DPMPD;
m. Mengatur administrasi umum DPMPD;
n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

Sekretariat Dinas dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
Sekretariat Dinas didalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh:
1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Setiap Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.

3. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian bidang kelembagaan dan partisipasi masyarakat serta pemberdayaan usaha ekonomi dan teknologi tepat guna.
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bidang Pemberdayaan Masyarakat kerja mempunyai fungsi :
a. Penyiapan rumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat;
b. Penyiapan rencana dan program kegiatan pemberdayaan masyarakat yang mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah daerah dan peraturan perundang-undangan;

c. Pelaksanaan koordinasi dengan Instansi/Lembaga terkait bidang pemberdayaan masyarakat;
d. Penyiapan pengendalian pelaksanaan program kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui penggerakan keswadayaan masyarakat dalam rangka mencapai kemandirian dan berkelanjutan;
e. Pelaksanaan fasilitasi program kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat;
f. Penyiapan pembinaan dan bimbingan di bidang pemberdayaan masyarakat;
g. Pengelolaan administrasi bidang pemberdayaan masyarakat; dan
h. Pelaksanana fungsi lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

Dalam melaksanakan fungsi, Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
a. Membuat perumusan kebijakan teknis bidang kelembagaan Merencanakan perumusan kebijakan teknis di bidang kelembagaan dan partisipasi masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi dan teknologi tepat guna;
b. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan kelembagaan dan partisipasi masyarakat, meliputi pengumpulan data dana desa dan kelurahan, lembaga kemasyarakatan, potensi desa, partisipasi masyarakat, dan kearifan lokal masyarakat sebagai perumusan dibidang lembaga kemasyarakatan;
c. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan pemberdayaan usaha ekonomi dan teknologi tepat guna, meliputi pengumpulan, pengolahan, menganalisa data ekonomi penduduk miskin, usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat, lembaga keuangan mikro, produksi hasil usaha masyarakat, serta pendayagunaan usaha teknologi tepat guna;
d. Melakukan koordinasi dengan lembaga/instansi terkait di bidang kelembagaan dan partisipasi masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi dan teknologi tepat guna;
e. Memberi petunjuk pelaksanaan program kegiatan di bidang kelembagaan dan partisipasi masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi dan teknologi tepat guna;
f. Mengendalikan pelaksanaan program kegiatan di bidang kelembagaan dan partisipasi masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi dan teknologi tepat guna;
g. Melakukan pembinaan dan bimbingan di bidang kelembagaan dan partisipasi masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi dan teknologi tepat guna;
h. Melaksanakan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah kebupaten serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang ama dalam daerah;
i. Mengevaluasi program dan kegiatan di bidang kelembagaan dan partisipasi masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi, dan teknologi tepat guna; dan
j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan

4. Bidang Penataan dan Kerja Sama Desa

Bidang Penataan dan Kerja Sama Desa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi serta pembinaan dan pengendalian di bidang penataan dan kerja sama desa.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Penataan dan Kerja Sama Desa mempunyai fungsi:

a. Penyiapan rumusan kebijakan teknis di bidang penataan dan kerja sama desa;
b. Penyiapan rencana dan program kegiatan yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan ketentuan peraturan perundang- undangan;
c. Pelaksanaan koordinasi dengan Instansi/Lembaga terkait di bidang penataan dan kerja sama desa;
d. Penyiapan pengendalian pelaksanaan program kegiatan di bidang penataan dan kerjasama desa;
e. Pelaksanaan fasilitasi program di bidang penataan dan kerjasama desa;
f. Penyiapan pembinaan dan bimbingan di bidang penataan dan kerjasama desa;
g. Pengelolaan administrasi di bidang penataan dan kerja sama desa; dan
h. Pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh pimpinan

Dalam melaksanakan fungsi Kepala Bidang Penataaan dan Kerja Sama Desa mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

a. Menyusun perumusan kebijakan teknis di bidang penataan dan kerja sama desa;
b. Melaksanakan program dan kegiatan di bidang penataan dan kerja sama desa;
c. Melakukan koordinasi dengan Instansi/Lembaga terkait di bidang penataan dan kerja sama desa;
d. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas di bidang penataan dan kerja sama desa;
e. Mengendalikan pelaksanaan program kegiatan di bidang penataan dan kerja sama desa;
f. Melakukan pembinaan dan bimbingan di bidang penataan dan kerja sama desa;
g. Melaksanakan penyelaenggaraan penataan desa;
h. Melaksanakan fasilitasi kerja sama antar desa;
i. Mengevaluasi program kegiatan di bidang penataan dan kerja sama desa;
j. Melaporkan hasil pelaksanaan program kegiatan di bidang penataan dan kerja sama desa; dan
k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.

5. Bidang Administrasi Pemerintahan Desa

Bidang Administrasi Pemerintahan Desa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian bidang administrasi pemerintahan desa. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Administrasi Pemerintahan Desa mempunyai fungsi:

a. Penyiapan rumusan kebijakan teknis di bidang administrasi pemerintahan desa;
b. Penyiapan rencana dan program kegiatan yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan peraturan perundang- undangan;
c. Pelaksanaan koordinasi dengan Instansi/Lembaga terkait di bidang administrasi pemerintahan desa;
d. Penyiapan pengendalian pelaksanaan program kegiatan di bidang administrasi pemerintahan desa;
e. Pelaksanaan fasilitasi program kegiatan di bidang administrasi pemerintahan desa;
f. Penyiapan pembinaan dan bimbingan di bidang administrasi pemerintahan desa;
g. Pengelolaan administrasi di bidang administrasi pemerintahan desa.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

a. Menyusun perumusan kebijakan teknis bidang administrasi pemerintahan desa;
b. Melaksanakan program dan kegiatan di bidang administrasi pemerintahan desa;
c. Melakukan koordinasi dengan Instansi/Lembaga terkait di bidang administrasi pemerintahan desa;
d. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas di bidang administrasi pemerintahan desa;
e. Mengendalikan pelaksanan program kegiatan di bidang administrasi pemerintahan desa;
f. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelanggaraan administrasi pemerintahan desa;
g. Mengevaluasi program kegiatan di bidang administrasi pemerintahan desa;
h. Melaporkan hasil pelaksanaan program kegiatan di bidang administrasi pemerintahan desa; dan
i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 24 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang, bahwa Susunan Organisasi Dinas terdiri dari :

Gambar 2.2
Struktur Organisasi

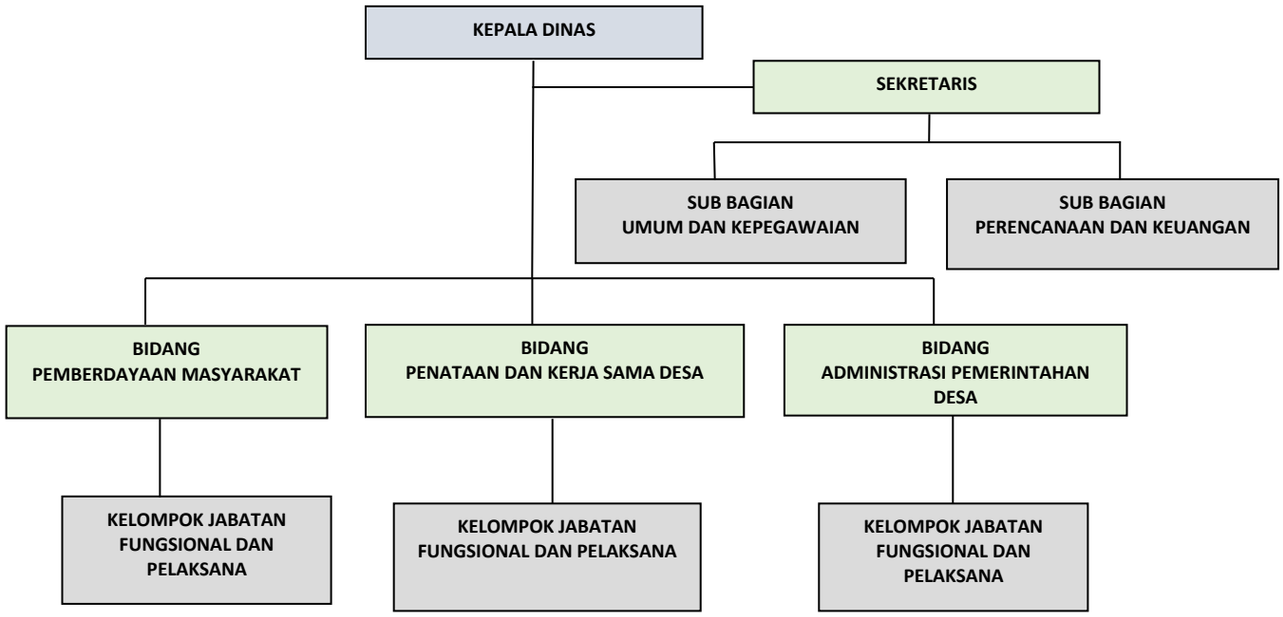

Dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsinya, DPMPD Kabupaten Tangerang telah menerapkan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Indikator Kinerja DPMPD berdasarkan Tujuan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan dan akuntabel dengan Indikator Nilai SAKIP SKPD;
2. Mendorong terwujudnya kemandirian ekonomi Desa dengan Indikator Jumlah Desa Mandiri.

Untuk mencapai target indikator kinerja tersebut, DPMPD menetapkan 4 (empat) Program. Program-program tersebut terbagi dalam Sekretariat dan 3 (tiga) Bidang, yaitu :

1. Sekretariat
   Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
   Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat
3. Bidang Administrasi Pemerintahan Desa
   Program Administrasi Pemerintahan Desa
4. Bidang Penataan dan Kerja Sama Desa
   Program Penataan Desa dan Program Penataan Kerja Sama Desa

Dalam kurun waktu Rencana Strategis tahun 2024 s.d. 2026 program dan kegiatan diarahkan pada pencapaian indikator tujuan

DPMPD sebagaimana tersebut diatas. Hasil analisa pencapaian kinerja pelayanan dimaksud terhadap indikator tujuan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan dan akuntabel diperoleh gambaran bahwa masih terdapat kendala dalam pencapaian target Nilai SAKIP DPMPD. Pada indikator tujuan meningkatnya kemandirian desa, hasil analisa menggambarkan bahwa target dengan indikator Indeks Desa Membangun, Jumlah Desa Mandiri telah tercapai. Sedangkan untuk capaian target pada tahun 2025 dan 2026 mendatang kami memproyeksikan akan tercapai sesuai dengan yang direncanakan.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi DPMPD Kabupaten Tangerang tetap mempertimbangkan isu-isu strategis Pemerintah Kabupaten Tangerang Tahun 2025, antara lain : Meningkatkan Ketahanan Sosial Desa, Penguatan Ekonomi Desa dan pengawasan penggunaan dana desa, Pengelolaan Sumber Daya Alam lokal (desa) yang berkelanjutan dan Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa. Dalam menindaklanjuti isu-isu strategis tersebut DPMPD Kabupaten Tangerang telah menetapkan arah kebijakan, antara lain: Meningkatkan penguatan koordinasi dan integrasi pembinaan SDM masyarakat Desa, Meningkatkan penguatan koordinasi dan integrasi penanganan kemiskinan, stunting dan fasilitasi penyediaan rumah layak huni dan sarana air bersih di desa, Pengembangan Sektor Unggulan Desa serta pengembangan UMKM Desa dan BUMDES sebagai pendukung makanan bergizi, Peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan, Menyediakan informasi tentang pengelolaan keuangan dan aset desa yang jelas dan transparan, Meningkatkan penguatan koordinasi dan integrasi kualitas lingkungan di desa, Pengembangan kegiatan konservasi lingkungan melalui pemberdayaan kelompok di desa (LPM, PKK, karang taruna, BUMDes,dll), Meningkatkan kompetensi SDM Aparatur Desa dan Perangkat Desa, Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan dana desa serta Mendorong implementasi digitalisasi desa.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Tangerang

Rancangan awal yang telah disusun pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang telah disesuaikan dengan perencanaan kinerja Dinas. Perencanaan Kinerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang. Di samping itu, dokumen rencana kinerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen rencana kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan

dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang.

Dalam konteks ini, perencanaan kinerja menjadi fondasi yang mengarahkan setiap langkah dan kegiatan yang akan dilakukan. Proses penjabaran sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah esensial untuk memastikan bahwa semua kegiatan yang dilaksanakan tidak hanya terarah, tetapi juga terukur dan dapat dievaluasi. Dokumen Rencana Kerja yang dihasilkan memuat informasi yang sangat mendetail mengenai sasaran yang ingin dicapai, indikator kinerja sasaran, serta rencana capaiannya. Lebih jauh lagi, dokumen ini juga mencakup informasi tentang program-program yang akan dilaksanakan, kegiatan-kegiatan spesifik yang dirancang untuk mencapai sasaran tersebut, serta kelompok indikator kinerja yang akan digunakan untuk menilai efektivitas dari setiap kegiatan.

Dalam konteks anggaran, pada rancangan awal ditetapkan Pagu APBD Tahun 2025 sebesar Rp. 48.525.151.892,-. Namun, pada bulan Maret terjadi efisiensi anggaran yang cukup signifikan sebesar Rp. 1.916.916.200,- sehingga total anggaran menjadi Rp. 46.608.235.692,-. Hal ini menunjukkan adanya upaya untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran yang ada, meskipun di sisi lain juga menuntut adanya analisis yang mendalam mengenai kebutuhan riil dari setiap program dan kegiatan. Setelah dilakukan analisis kebutuhan anggaran, pada RKPD Perubahan DPMPD Tahun Anggaran 2025, total anggaran mengalami peningkatan menjadi Rp. 51.992.787.831,-. Penambahan anggaran ini sangat penting untuk mendukung program-program yang dianggap prioritas, seperti Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Administrasi Pemerintahan Desa, serta Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat.

Secara detail, reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2025 pada DPMPD dapat dilihat pada tabel yang menyajikan informasi terstruktur mengenai alokasi anggaran, program, dan kegiatan yang direncanakan. Tabel ini tidak hanya memberikan gambaran yang jelas tentang distribusi anggaran, tetapi juga memudahkan pemangku kepentingan untuk memahami prioritas dan fokus dari setiap program yang direncanakan. Dengan pendekatan yang sistematis dan berbasis data, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang dapat memastikan bahwa setiap rupiah yang diinvestasikan akan memberikan dampak yang maksimal bagi masyarakat. Berikut tabel rancangan awal RKPD DPMPD Tahun 2025:

Reviu Terhadap Rancangan Awal
RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2025
Tabel 2.3

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							
			TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA				**33.993.656.597,00**	**48.525.151.892,00**	**51.992.787.831,00**	**17.999.131.234,00**		**12.358.918.553,00**
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**33.993.656.597,00**	**48.525.151.892,00**	**51.992.787.831,00**	**17.999.131.234,00**		**12.358.918.553,00**
2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**				**33.993.656.597,00**	**48.525.151.892,00**	**51.992.787.831,00**	**17.999.131.234,00**		**12.358.918.553,00**
2.13.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan**	**100 Persen**	**100 Persen**	**12.634.823.197,00**	**11.712.714.830,00**	**12.273.869.639,00**	**-275.904.644,00**		**12.358.918.553,00**
2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah*	6 Dokumen	8 Dokumen	278.372.000,00	301.065.940,00	230.253.940,00	-48.118.060,00		290.000.000,00
2.13.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	7 Dokumen	102.412.000,00	98.059.650,00	73.279.650,00	-29.132.350,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	100.000.000,00

KODE			CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.13.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	4 Laporan	32.888.000,00	32.648.000,00	32.648.000,00	-240.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	40.000.000,00
2.13.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	2 Laporan	143.072.000,00	170.358.290,00	124.326.290,00	-18.745.710,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	150.000.000,00
2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah laporan keuangan*	2 Dokumen	2 Dokumen	9.651.206.597,00	8.737.785.750,00	9.579.137.889,00	-72.068.708,00		9.653.656.597,00
2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	42 Orang/bulan	39 Orang/bulan	9.618.656.597,00	8.723.515.150,00	9.564.867.289,00	-53.789.308,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	9.618.656.597,00
2.13.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	5 Laporan	32.550.000,00	14.270.600,00	14.270.600,00	-18.279.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	35.000.000,00
KODE			**CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN**							

	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.13.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Tersedianya dokumen Barang Milik Daerah*	1 Dokumen	2 Dokumen	24.948.000,00	16.838.140,00	12.478.410,00	-12.469.590,00		25.000.000,00
2.13.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD									
		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	9.990.000,00	10.000.080,00	7.410.060,00	-2.579.940,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	10.000.000,00
2.13.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD									
		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	4 Laporan	14.958.000,00	6.838.060,00	5.068.350,00	-9.889.650,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	15.000.000,00
2.13.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal*	75 Orang	60 Orang	238.740.000,00	331.784.000,00	301.626.400,00	62.886.400,00		282.000.000,00
2.13.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	42 Paket	60 Paket	83.440.000,00	115.900.000,00	115.900.000,00	32.460.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	100.000.000,00
2.13.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	10 Orang	32.000.000,00	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	32.000.000,00
2.13.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan									
		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-	42 Orang	60 Orang	123.300.000,00	183.884.000,00	153.726.400,00	30.426.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	150.000.000,00
KODE			**CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN**							

	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*tersedianya dokumen layanan administrasi umum perangkat daerah*	6 Dokumen	7 Dokumen	1.525.326.600,00	889.629.500,00	671.561.500,00	-853.765.100,00		1.169.000.000,00
2.13.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	29.885.000,00	26.482.000,00	26.482.000,00	-3.403.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	30.000.000,00
2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	6 Paket	501.260.000,00	67.997.000,00	67.997.000,00	-433.263.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	300.000.000,00
2.13.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	25 Paket	1 Paket	198.121.200,00	132.552.500,00	132.552.500,00	-65.568.700,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	198.000.000,00
2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	3 Paket	46.994.400,00	59.170.000,00	51.430.000,00	4.435.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	46.000.000,00
2.13.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	3 Dokumen	111.066.000,00	124.150.000,00	105.340.000,00	-5.726.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	100.000.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							
			TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.13.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	11 Dokumen Laporan	2 Laporan	108.000.000,00	119.400.000,00	107.850.000,00	-150.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	95.000.000,00
2.13.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	3 Laporan	530.000.000,00	359.878.000,00	179.910.000,00	-350.090.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	400.000.000,00
2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-	6 Jenis	371.050.000,00	624.961.568,00	668.161.568,00	297.111.568,00		497.052.000,00
2.13.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	15.162.000,00	0,00	0,00	-15.162.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	15.162.000,00
2.13.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	355.888.000,00	624.961.568,00	668.161.568,00	312.273.568,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	481.890.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							
			TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*tersedianya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah*	-	4 Jenis	545.180.000,00	810.649.932,00	810.649.932,00	265.469.932,00		442.209.956,00
2.13.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit	9 Unit	357.500.000,00	332.149.932,00	332.149.932,00	-25.350.068,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	356.359.956,00
2.13.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	40 Unit	85.500.000,00	85.500.000,00	85.500.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	85.850.000,00
2.13.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	51.090.000,00	196.500.000,00	196.500.000,00	145.410.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0,00
2.13.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	51.090.000,00	196.500.000,00	196.500.000,00	145.410.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							
			TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.13.02	**PROGRAM PENATAAN DESA**	**Persentase Desa yang Tertata**	**0,81 Persen**	**0,81 Persen**	**1.651.702.000,00**	**620.769.040,00**	**602.899.870,00**	**-1.651.702.000,00**		**0,00**
2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	*jumlah rekomendasi penataan desa*	1 Desa	2 Desa	1.651.702.000,00	620.769.040,00	602.899.870,00	-1.048.802.130,00		0,00
2.13.02.2.01.0002	Fasilitasi Tata Wilayah Desa									
		Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	1 Desa	1 Desa	1.045.413.000,00	59.080.050,00	41.210.880,00	-1.004.202.120,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0,00
2.13.02.2.01.0003	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa									
		Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya	1 Desa	1 Desa	138.942.000,00	561.688.990,00	561.688.990,00	422.746.990,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0,00
2.13.02.2.01.0004	Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa									
		Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penamaan dan Kode Desa	1 Desa	1 Desa	217.381.000,00	0,00	0,00	-217.381.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0,00
2.13.02.2.01.0006	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa									
		Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	1 Unit	1 Unit	249.966.000,00	0,00	0,00	-249.966.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							
			TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.13.03	**PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA**	**Persentase desa yang difasilitasi kerjasamanya**	**0,81 Persen**	**0,81 Persen**	**650.858.000,00**	**842.689.240,00**	**643.158.210,00**	**-650.858.000,00**		**0,00**
2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	*Jumlah desa yang difasilitasi kerjasamanya*	1 Desa	2 Desa	650.858.000,00	842.689.240,00	643.158.210,00	-7.699.790,00		0,00
2.13.03.2.01.0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota									
		Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	26.456.000,00	561.688.990,00	362.157.960,00	335.701.960,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0,00
2.13.03.2.01.0002	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota									
		Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	26.784.000,00	0,00	0,00	-26.784.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0,00
2.13.03.2.01.0003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan									
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	1 Dokumen	1 Dokumen	597.618.000,00	281.000.250,00	281.000.250,00	-316.617.750,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							
			TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.13.04	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Peningkatan Administrasi Pemerintahan Desa**	**14,23 Persen**	**31,71 Persen**	**7.818.066.480,00**	**7.879.211.912,00**	**8.572.515.826,00**	**-7.818.066.480,00**		**0,00**
2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	*Jumlah Desa Mandiri*	35 Desa	78 Desa	7.818.066.480,00	7.879.211.912,00	8.572.515.826,00	754.449.346,00		0,00
2.13.04.2.01.0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa									
		Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	246 Dokumen	246 Dokumen	236.520.000,00	189.770.000,00	111.400.000,00	-125.120.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0,00
2.13.04.2.01.0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa									
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	625.000.000,00	197.975.000,00	151.578.750,00	-473.421.250,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0,00
2.13.04.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa									
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	3 Dokumen	3 Dokumen	105.354.000,00	130.822.500,00	130.822.500,00	25.468.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0,00
2.13.04.2.01.0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa									
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	2 Dokumen	2 Dokumen	5.011.346.480,00	6.424.605.712,00	7.417.643.576,00	2.406.297.096,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							
			TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.13.04.2.01.0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa									
		Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	50 Orang	50 Orang	217.620.000,00	80.135.000,00	61.645.000,00	-155.975.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0,00
2.13.04.2.01.0006	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa									
		Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	1 Laporan	1 Laporan	174.528.000,00	38.265.000,00	27.005.000,00	-147.523.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0,00
2.13.04.2.01.0007	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa									
		Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	33.318.000,00	153.737.500,00	115.642.500,00	82.324.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0,00
2.13.04.2.01.0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa									
		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	313.875.000,00	53.914.000,00	39.548.500,00	-274.326.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0,00
2.13.04.2.01.0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa									
		Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	44.400.000,00	0,00	0,00	-44.400.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							
			TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.13.04.2.01.0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa									
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	178.200.000,00	120.777.500,00	90.962.500,00	-87.237.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0,00
2.13.04.2.01.0014	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD									
		Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	246 Orang	246 Orang	259.470.000,00	82.797.500,00	61.702.500,00	-197.767.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0,00
2.13.04.2.01.0016	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa									
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	1 Laporan	1 Laporan	241.893.000,00	227.396.000,00	199.687.000,00	-42.206.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0,00
2.13.04.2.01.0017	Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa									
		Jumlah Dokumen Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	179.118.000,00	0,00	0,00	-179.118.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0,00
2.13.04.2.01.0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan									
		Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	1 Dokumen	1 Dokumen	197.424.000,00	179.016.200,00	164.878.000,00	-32.546.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							
			TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.13.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**Prosentase lembaga Kemasyarakatan Desa yang difasilitasi**	**100 Persen**	**100 Persen**	**11.238.206.920,00**	**27.469.766.870,00**	**29.900.344.286,00**	**-11.238.206.920,00**		**0,00**
2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah lembaga Kemasyarakatan Desa yang difasilitasi*	7 LKD	4 LKD	11.238.206.920,00	27.469.766.870,00	29.900.344.286,00	18.662.137.366,00		0,00
2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat									
		Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	2 Dokumen	2 Dokumen	8.250.872.920,00	23.769.529.680,00	26.374.071.846,00	18.123.198.926,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							
			TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat									
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	3 Lembaga	4 Lembaga	945.000.000,00	938.584.160,00	1.044.309.160,00	99.309.160,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0,00
2.13.05.2.01.0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa									
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	122.202.000,00	431.786.090,00	223.638.740,00	101.436.740,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0,00
2.13.05.2.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna									
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	2 Laporan	2 Laporan	420.174.000,00	538.440.160,00	518.100.160,00	97.926.160,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0,00
2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga									
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen	4 Dokumen	1.499.958.000,00	1.791.426.780,00	1.740.224.380,00	240.266.380,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0,00
J U M L A H					**33.993.656.597,00**	**48.525.151.892,00**	**51.992.787.831,00**	**1.284.717.462.164,00**		**12.358.918.553,00**

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana program merupakan cara untuk mendukung arah kebijakan yang telah ditetapkan. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang telah menetapkan rencana program utama untuk program lima tahun ke depan. Program-program ini dirancang untuk mendukung tujuan strategis yang ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang. Adapun rencana program prioritas tersebut adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota: Program ini bertujuan untuk memperkuat fungsi dan peran pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Melalui program ini, diharapkan ada peningkatan efisiensi dan efektivitas administrasi pemerintahan daerah yang dapat memberikan dampak positif terhadap kualitas pelayanan public;
2. Program Administrasi Pemerintahan Desa: Program ini fokus pada peningkatan kapasitas administrasi di tingkat desa. Dengan administrasi yang baik, diharapkan desa-desa di Kabupaten Tangerang dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan lebih efektif, transparan, dan akuntabel;
3. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat: Program ini bertujuan untuk mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam pembangunan desa. Pemberdayaan lembaga-lembaga kemasyarakatan ini diharapkan dapat meningkatkan potensi ekonomi lokal serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa;
4. Program Penataan Desa: Program ini berfokus pada penataan dan pengembangan desa agar lebih terstruktur dan terencana. Penataan ini meliputi aspek fisik, sosial, ekonomi, dan budaya desa sehingga dapat menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi masyarakat desa;
5. Program Peningkatan Kerjasama Desa: Program ini dirancang untuk mendorong kolaborasi antar desa dalam berbagai bidang. Dengan adanya kerjasama ini, diharapkan desa-desa dapat saling mendukung dan memanfaatkan potensi masing-masing untuk mencapai tujuan pembangunan bersama.

   Untuk mendukung implementasi program-program prioritas tersebut, terdapat alokasi anggaran yang disesuaikan dengan kebutuhan dan prioritas program antara lain penambahan alokasi anggaran untuk BPJS Kesehatan Perangkat desa, penyesuaian belanja pegawai serta pemberian bantuan hibah kepada KPM.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Tujuan pembangunan sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Esensi dasar inilah yang dijadikan landasan dalam merencanakan pembangunan, baik pembangunan dalam skala nasional maupun lingkup daerah. Dalam rangka mewujudkan keselarasan tujuan dan sasaran pembangunan antar tingkatan pemerintahan, maka perumusan tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Tangerang turut memperhatikan tujuan dan sasaran pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2025, maupun tujuan dan sasaran pembangunan daerah Provinsi Banten dalam RKPD Provinsi Banten Tahun 2025, serta mengacu tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang hendak dicapai pada tahun 2025 pada RPD Kabupaten Tangerang Tahun 2024- 2026.

Kedudukan RKP Tahun 2025 sebagai penjabaran tahun terakhir dari RPJMN Tahun 2020- 2025 melatarbelakangi komitmen pemerintah untuk mengutamakan pencapaian target-target pembangunan pada tahun 2025 sebagaimana termuat dalam RPJMN sehingga hasil pembangunan diharapkan dapat benar-benar dirasakan oleh penerima manfaat dan menghasilkan stabilitas di berbagai bidang pembangunan. Hal ini guna menyediakan prakondisi yang kuat sebagai fondasi pembangunan nasional jangka menengah periode selanjutnya (2025-2029). Dalam sudut pandang ini, RKP Tahun 2025 menjadi sangat strategis. Tema "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan" dipandang sebagai upaya terhadap pencapaian target-target sasaran akhir RPJMN Tahun 2020-2025, dan mendorong terciptanya fondasi yang kokoh untuk melanjutkan estafet pembangunan periode 2025-2029.

Berdasarkan tema dan sasaran pembangunan RKP Tahun 2025, ditetapkan tiga arah kebijakan pembangunan yaitu :

1. SDM Berkualitas melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta penguatan karakter dan jati diri bangsa.
2. Infrastruktur Berkualitas yang diarahkan pada peningkatan Infrastruktur konektivitas, pengembangan transisi energi, percepatan infrastruktur IKN hingga reformasi pengelolaan sampah.
3. Ekonomi Inklusif dan berkelanjutan (Pertumbuhan Ekonomi yang Menciptakan Lapangan Kerja Berkualitas, Menurunkan Ketimpangan, dan Penciptaan Produk Ramah Lingkungan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

Pernyataan misi suatu organisasi adalah tujuan organisasi, yaitu sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu suatu perencanaan. Sedangkan Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan organisasi, yaitu hasil yang akan dicapai

secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai serta dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
Tujuan yang ingin diwujudkan adalah :
1. Meningkatkan Pembangunan Desa;
2. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan dan akuntabel.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan organisasi, yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai, serta dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Sasaran yang ingin dicapai adalah :
1. Meningkatnya Desa Mandiri;
2. meningkatnya akuntabilitas kinerja

Tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa tersaji dalam tabel sebagai berikut:

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
Kabupaten Tangerang
Tabel 3.1

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal Kinerja		Target Capaian			Kondisi Akhir
						2022*	2023**	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatkan Pembangunan Desa		Nilai Indeks Desa Membangun Kab. Tangerang	Capaian Indeks Desa Membangun Kab. Tangerang	Nilai	0,7107	0,7207	0,7307	0,7407	0,7507	IDM 0,7507
		Meningkatnya Desa Mandiri	Persentase Jumlah Desa Mandiri	Jumlah Desa Mandiri dibagi jumlah Desa	Persentase	2,03	6,10	10,16	14,23	18,29	18,29
2	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan dan akuntabel		Nilai SAKIP DPMPD	Nilai SAKIP	Nilai	71,3	73,5	74,5	75,5	76,5	Nilai SAKIP 76,5
		meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai SAKIP DPMPD	Nilai SAKIP	Nilai	71,3	73,5	74,5	75,5	76,5	Nilai SAKIP 76,5

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dapat digambarkan dalam Indikator Kinerja Dinas sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa tersaji dalam tabel sebagai berikut:

Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
Tabel 3.2

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal Kinerja		Target			Kondisi Akhir
			2022*	2023**	2024	2025	2026	
1	Persentase Jumlah Desa Mandiri	Persentase	2,03	6,10	10,16	14,23	18,29	18,29
2	Nilai SAKIP SKPD	Nilai	71,3	73,5	74,5	75,5	76,5	76,5

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam upaya meningkatkan kinerja, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang merancang Rencana Kerja (Renja) Perubahan yang komprehensif untuk tahun 2025 yang berfokus pada berfokus pada belanja operasi.

Rencana ini tidak hanya mencakup program-program strategis, tetapi juga alokasi pendanaan yang tepat untuk memastikan implementasi yang efektif. Dua aspek penting dalam rencana ini adalah belanja pegawai dan belanja hibah, yang masing-masing memiliki peran krusial dalam mendukung tujuan pembangunan daerah.

Belanja pegawai merupakan salah satu komponen utama dalam Rencana Kerja (Renja) Perubahan yang masuk ke dalam Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN. Program lainnya yang dialokasikan penambahan anggaran pada Rencana Kerja (Renja) Perubahan tahun 2025 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah Program Administrasi Pemerintahan Desa pada sub kegiatan Pengelolaan Keuangan Desa yaitu penambahan anggaran BPJS Kesehatan bagi Perangkat Desa, Program Penataan dan Kerjasama Desa, serta Program Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat yang dialokasikan untuk penyelenggaraan kegiatan Posyandu, PKK dan Hibah.

Selain itu, pemberian bantuan hibah belanja hibah juga memainkan peranan penting dalam mendukung program-program yang dirancang oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa. Hibah ini dapat dialokasikan untuk berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat, mulai dari pendidikan dan pelatihan hingga program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Contohnya, hibah yang diberikan untuk untuk program pelatihan kewirausahaan seperti pelatihan dan pemberdayaan tata boga dapat membantu masyarakat dalam mengembangkan usaha kecil dan menengah, yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam merencanakan belanja pegawai dan belanja hibah, penting untuk mempertimbangkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Oleh karena itu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa harus melakukan kajian yang mendalam mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat di Kabupaten Tangerang. Melalui pendekatan partisipatif, di mana masyarakat dilibatkan dalam proses perencanaan, diharapkan rencana kerja yang disusun benar-benar mencerminkan kebutuhan nyata di lapangan.

Dari segi pendanaan, Rencana Kerja (Renja) Perubahan ini akan memerlukan alokasi anggaran yang memadai untuk mendukung semua program yang telah dirancang. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang akan berupaya untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran perubahan tahun 2025.

Dalam implementasi Rencana Kerja (Renja) Perubahan ini, penting untuk melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan secara berkala. Monitoring akan memastikan bahwa semua program berjalan sesuai dengan rencana, sementara evaluasi akan memberikan gambaran mengenai dampak dari program yang telah dilaksanakan.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang Tahun 2025 merupakan langkah yang sangat penting dalam upaya meningkatkan kinerja lembaga pemerintahan. Dengan fokus pada pengembangan kapasitas SDM, partisipasi masyarakat, kolaborasi antar pihak, serta pengawasan dan evaluasi yang efektif, Renja ini tidak hanya akan meningkatkan efektivitas program, tetapi juga akan memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat, sehingga diharapkan semua program yang direncanakan dapat terlaksana dengan baik. Selain itu, pengelolaan anggaran yang efisien dan evaluasi yang berkelanjutan akan memastikan bahwa semua upaya ini memberikan dampak positif bagi masyarakat. Dengan komitmen dan kerjasama dari semua pihak, sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang untuk meningkatkan desa mandiri akan terealisasi dengan mudah.

Adapun Rencana Kerja dan Pendanaan DPMPD Kabupaten Tangerang Tahun 2025 disajikan pada Tabel 4.1 berikut ini :

Rencana Kerja dan Pendanaan DPMPD Kabupaten Tangerang pada APBD Perubahan Tahun 2025
Tabel 4.1

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR TARGET	ANGGARAN		Bertambah /Berkurang
				APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	
1	2	3	4	5	6	7
2.13.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan**	**100 Persen**	**11.712.714.830,00**	**12.273.869.639,00**	**561.154.809,00**
2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah*	8 Dokumen	301.065.940,00	230.253.940,00	**-70.812.000,00**
2.13.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	7 Dokumen	98.059.650,00	73.279.650,00	**-24.780.000,00**
2.13.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	4 Laporan	32.648.000,00	32.648.000,00	**0,00**
2.13.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	2 Laporan	170.358.290,00	124.326.290,00	**-46.032.000,00**
2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah laporan keuangan*	2 Dokumen	8.737.785.750,00	9.579.137.889,00	**841.352.139,00**
2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	39 Orang/ bulan	8.723.515.150,00	9.564.867.289,00	**841.352.139,00**
2.13.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	5 Laporan	14.270.600,00	14.270.600,00	**0,00**

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR TARGET	ANGGARAN		Bertambah /Berkurang
				APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	
1	2	3	4	5	6	7
2.13.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Tersedianya dokumen Barang Milik Daerah*	2 Dokumen	16.838.140,00	12.478.410,00	**-4.359.730,00**
2.13.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	*Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD*	2 Dokumen	10.000.080,00	7.410.060,00	**-2.590.020,00**
2.13.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	*Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD*	4 Laporan	6.838.060,00	5.068.350,00	**-1.769.710,00**
2.13.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal*	60 Orang	331.784.000,00	301.626.400,00	**-30.157.600,00**
2.13.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*	60 Paket	115.900.000,00	115.900.000,00	**0,00**
2.13.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*	10 Orang	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00
2.13.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*	60 Orang	183.884.000,00	153.726.400,00	**-30.157.600,00**
2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*tersedianya dokumen layanan administrasi umum perangkat daerah*	7 Dokumen	889.629.500,00	671.561.500,00	**-218.068.000,00**
2.13.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	1 Paket	26.482.000,00	26.482.000,00	**0,00**

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR TARGET	ANGGARAN		Bertambah /Berkurang
				APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	
1	2	3	4	5	6	7
2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	6 Paket	67.997.000,00	67.997.000,00	**0,00**
2.13.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	1 Paket	132.552.500,00	132.552.500,00	**0,00**
2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	3 Paket	59.170.000,00	51.430.000,00	**-7.740.000,00**
2.13.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*	3 Dokumen	124.150.000,00	105.340.000,00	**-18.810.000,00**
2.13.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	2 Laporan	119.400.000,00	107.850.000,00	**-11.550.000,00**
2.13.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	3 Laporan	359.878.000,00	179.910.000,00	**-179.968.000,00**
2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	6 Jenis	624.961.568,00	668.161.568,00	**43.200.000,00**
2.13.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	1 Laporan	624.961.568,00	668.161.568,00	**43.200.000,00**

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR TARGET	ANGGARAN		Bertambah /Berkurang
				APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	
1	2	3	4	5	6	7
2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*tersedianya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah*	4 Jenis	810.649.932,00	810.649.932,00	**0,00**
2.13.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*	9 Unit	332.149.932,00	332.149.932,00	**0,00**
2.13.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	40 Unit	85.500.000,00	85.500.000,00	**0,00**
2.13.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	1 Unit	196.500.000,00	196.500.000,00	**0,00**
2.13.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	1 Unit	196.500.000,00	196.500.000,00	**0,00**
2.13.02	**PROGRAM PENATAAN DESA**	**Persentase Desa yang Tertata**	**0,81 Persen**	**620.769.040,00**	**602.899.870,00**	**-17.869.170,00**
2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	*jumlah rekomendasi penataan desa*	2 Desa	620.769.040,00	602.899.870,00	**-17.869.170,00**
2.13.02.2.01.0002	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	*Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya*	1 Desa	59.080.050,00	41.210.880,00	**-17.869.170,00**
2.13.02.2.01.0003	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	*Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya*	1 Desa	561.688.990,00	561.688.990,00	**0,00**

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR TARGET	ANGGARAN		Bertambah /Berkurang
				APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	
1	2	3	4	5	6	7
2.13.03	**PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA**	**Persentase desa yang difasilitasi kerjasamanya**	**0,81 Persen**	**842.689.240,00**	**643.158.210,00**	**-199.531.030,00**
2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	*Jumlah desa yang difasilitasi kerjasamanya*	2 Desa	842.689.240,00	643.158.210,00	**-199.531.030,00**
2.13.03.2.01.0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota*	1 Dokumen	561.688.990,00	362.157.960,00	**-199.531.030,00**
2.13.03.2.01.0003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan*	1 Dokumen	281.000.250,00	281.000.250,00	**0,00**
2.13.04	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Peningkatan Administrasi Pemerintahan Desa**	**31,71 Persen**	**7.879.211.912,00**	**8.572.515.826,00**	**693.303.914,00**
2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	*Jumlah Desa Mandiri*	78 Desa	7.879.211.912,00	8.572.515.826,00	**693.303.914,00**
2.13.04.2.01.0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	*Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa*	246 Dokumen	189.770.000,00	111.400.000,00	**-78.370.000,00**
2.13.04.2.01.0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa*	1 Dokumen	197.975.000,00	151.578.750,00	**-46.396.250,00**
2.13.04.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa*	3 Dokumen	130.822.500,00	130.822.500,00	**0,00**
2.13.04.2.01.0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa*	2 Dokumen	6.424.605.712,00	7.417.643.576,00	**993.037.864,00**

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR TARGET	ANGGARAN		Bertambah /Berkurang
				APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	
1	2	3	4	5	6	7
2.13.04.2.01.0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	*Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas*	50 Orang	80.135.000,00	61.645.000,00	**-18.490.000,00**
2.13.04.2.01.0006	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	*Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa*	1 Laporan	38.265.000,00	27.005.000,00	**-11.260.000,00**
2.13.04.2.01.0007	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa*	1 Dokumen	153.737.500,00	115.642.500,00	**-38.095.000,00**
2.13.04.2.01.0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa*	1 Dokumen	53.914.000,00	39.548.500,00	**-14.365.500,00**
2.13.04.2.01.0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa*	1 Dokumen	120.777.500,00	90.962.500,00	**-29.815.000,00**
2.13.04.2.01.0014	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	*Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas*	246 Orang	82.797.500,00	61.702.500,00	**-21.095.000,00**
2.13.04.2.01.0016	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	*Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa*	1 Laporan	227.396.000,00	199.687.000,00	**-27.709.000,00**
2.13.04.2.01.0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	*Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan*	1 Dokumen	179.016.200,00	164.878.000,00	**-14.138.200,00**

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR TARGET	ANGGARAN		Bertambah /Berkurang
				APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	
1	2	3	4	5	6	7
2.13.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**Prosentase lembaga Kemasyarakatan Desa yang difasilitasi**	**100 Persen**	**27.469.766.870,00**	**29.900.344.286,00**	**2.430.577.416,00**
2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah lembaga Kemasyarakatan Desa yang difasilitasi*	4 LKD	27.469.766.870,00	29.900.344.286,00	**2.430.577.416,00**
2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	*Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat*	2 Dokumen	23.769.529.680,00	26.374.071.846,00	**2.604.542.166,00**
2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya*	4 Lembaga	938.584.160,00	1.044.309.160,00	**105.725.000,00**

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR TARGET	ANGGARAN		Bertambah /Berkurang
				APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	
1	2	3	4	5	6	7
2.13.05.2.01.0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa*	1 Dokumen	431.786.090,00	223.638.740,00	**-208.147.350,00**
2.13.05.2.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	*Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna*	2 Laporan	538.440.160,00	518.100.160,00	**-20.340.000,00**
2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga*	4 Dokumen	1.791.426.780,00	1.740.224.380,00	**-51.202.400,00**
J U M L A H				**48.525.151.892,00**	**51.992.787.831,00**	**3.467.635.939,00**

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang Provinsi Banten Tahun 2025 ini merupakan revisi rencana kerja (Renja) Tahun 2025 berdasarkan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang Tahun 2024 – 2026 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Daerah Kabupaten Tangerang.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang Provinsi Banten sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2025 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja periode sebelumnya.

Dengan adanya Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang Tahun 2025, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan dengan sesama Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Tangerang maupun dengan Perangkat Daerah yang membidangi fungsi lain.

22. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bahwa Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah (Perubahan Renja PD), merupakan dokumen perubahan perencanaan kerja sebuah Perangkat Daerah dalam tahun anggaran berjalan. Rencana kerja Perubahan disusun berdasarkan kewenangan, tugas pokok dan fungsi suatu Perangkat Daerah, disamping juga berpedoman pada Rencana Strategis, RPJMD dan RPJPD. Perubahan Rencana kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025 disusun berpedoman pada RPJPD Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2045. Dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan juga didasarkan pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2026. Dengan adanya acuan diatas, rencana kerja perubahan yang disusun diharapkan dapat sistematis dan berkelanjutan dalam mencapai sasaran. Pada akhirnya Perubahan Renja diharapkan dapat menjadi acuan untuk menyusun anggaran kinerja yang tertuang dalam APBD Perubahan Kabupaten Tangerang Tahun 2025. Menindaklanjuti ketentuan:

a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019,
b. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan
c. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Maka Rancangan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 untuk Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, yang tentunya berdasarkan skala prioritas program/kegiatan dan besaran anggaran masing-masing program/kegiatan sesuai dengan ketersediaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tangerang.

Perkembangan lingkungan strategis baik nasional maupun regional/daerah mengharuskan birokrasi (pemerintah pusat dan daerah) untuk mengkaji ulang dasar pendekatan (paradigma) dan sistem penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang terarah pada terwujudnya pemerintahan yang baik, yaitu pemerintahan yang demokratis, desentralistis, partisipatif, transparan, profesional, berkeadilan, menegakkan supremasi hukum dan HAM, bersih dan akuntabel, serta berorientasi pada pemberdayaan masyarakat. Dinas Pendidikan sesuai tugas pokok dan fungsinya berupaya mendukung penyelenggaraan pemerintahan tersebut di bidang pendidikan, pemuda dan olahraga melalui sistem perencanaan dan penganggaran yang baik pada aspek proses dan mekanisme maupun tahapan pelaksanaan.

1.2. Landasan Hukum

Dasar penyusunan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Tahun 2025 adalah :

A. Landasan Nasional dan Konstitusional

1. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Landasan Konstitusional: UUD 1945.
3. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
4. Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005–2025.
5. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terakhir diubah oleh UU No. 9 Tahun 2015.

B. Landasan Kelembagaan & Administratif
1. Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2014 tentang SAKIP.
2. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan & Pengawasan Pemda.
3. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2019 tentang Laporan & Evaluasi Penyelenggaraan Pemda.
5. Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang SAKIP.

C. Landasan Manajemen Kinerja ASN/PNS
1. Permen PANRB No. 53 Tahun 2014: Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Instansi
2. Landasan Perencanaan & Evaluasi Pemda
3. Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian & Evaluasi Pembangunan Desa/Daerah.
4. Perbup Kabupaten Tangerang No. 16 Tahun 2025 tentang RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2025

D. Landasan Daerah Provinsi dan Kabupaten Tangerang
1. Perda Provinsi Banten No. 1 Tahun 2010 (RPJPD Banten 2005–2025).
2. Perda Provinsi Banten No. 10 Tahun 2019 (RPJMD Banten 2017–2022).
3. Perda Kabupaten Tangerang No. 12 Tahun 2009 (RPJPD Kabupaten 2005–2025).
4. Perda Kabupaten Tangerang No. 9 Tahun 2020 tentang Perubahan RTRW Kabupaten 2011–2031.
5. Perda Kabupaten Tangerang No. 2 Tahun 2022 mengenai Perubahan Perangkat Daerah (pengganti Perda No. 4 Tahun 2020)

1.3 Maksud dan tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pendidikan Tahun
2025 adalah:

1. Memberikan informasi evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I tahun 2025;
2. Menjabarkan perubahan indicator kinerja program, kegiatan, dan sub kegiatan berdasarkan perubahan RKPD Tahun 2025;
3. Memberikan pedoman perubahan indicator kinerja program, kegiatan, dan kegiatan dan sub kegiiatan yang meliputi perubahan keluaran, target keluaran, lokasi dan pagu indikatif.

1.3.2 Tujuan

Tujuan dari penyusunan Renja Dinas Pengendalian Penduduk Dan

Keluarga Berencana Kabupaten Tangerang Tahun 2025 ini adalah: menyiapkan perubahan dokumen perencanaan kinerja tahunan yang operasional:

a. Sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Tangerang
   Tahun 2025 untuk memastikan pencapaian target tahunan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan RPD Kabupaten Tangerang di Tahun 2025 ;
b. Sebagai Instrumen akuntabilitas kinerja di tahun 2025 yang hasilnya akan dituangkan dalam laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan laporan kinerja.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Tangerang Tahun 2025 disusun berikut :

Bab I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan sertasistematika penulisan.

Bab II. EVALUASI RENCANA KERJA TW. I PD TAHUN 2025

Evaluasi Pelaksanaan Renja dan capaian Renstra Perangkat Daerah Triwulan I, analisis kinerja pelayanan perangkat daerah, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi perangkat daerah, hasil review Terhadap Rancangan awal RKPD, serta Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Bab III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisi Rencana Kerja dan Rencana Pendanaan, yaitu Program Pembangunan Daerah (Program Strategis Daerah) dan Program Perangkat Daerah untuk mewujudkan target tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah dan RPJMD.

Bab IV. PENUTUP

BAB II
EVALUASI PERANGKAT DAERAH
PERANGKAT DAERAH TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwaulan I tahun 2025

Rencana Kerja Rencana Kerja tahun 2025 Disdikpora terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal. Belanja Operasi merupakan Belanja Pegawai dan Operasional pada Disdikpora, sedangkan Belanja Modal merupakan Belanja yang terdiri dari 2 Urusan yaitu Urusan Pendidikan dan Urusan Kepemudaan dan Keolahragaan, yang merupakan program dan kegiatan yang mengacu pada pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan ditambah kegiatan Kepemudaan dan Keolahragaan. Program tersebut terdiri dari 8 (Delapan) Program dan 17 (Tujuh Belas) Kegiatan yang terurai ke dalam 120 (Seratus duapuluh) Sub Kegiatan. Pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Indikator kinerja utama Dinas Pengendalian penduduk

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1.1	Meningkatnya Kinerja Pengendalian Penduduk	Angka Kelahiran Total (TFR)	%	2.08
1.2	Meningkatnya Kualitas Keluarga	Index Pembangunan Keluarga	%	63.46
1.3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	NILAI AKIP	Angka	79.60

Evaluasi Program dan Kegiatan pada Renja Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Tahun 2025 adalah :

1. Realisasi program yang tidak memenuhi target kinerja, hasil dan keluaran yang di rencanakan

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1.1	Meningkatnya Kinerja Pengendalian Penduduk	Angka Kelahiran Total (TFR)	%	2.08
1.2	Meningkatnya Kualitas Keluarga	Index Pembangunan Keluarga	%	63.46

1.3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	NILAI AKIP	Angka	79.60

2. Uraian penjelasan tabel:

Meningkatnya Kinerja Pengendalian Penduduk: Ini mengacu pada usaha atau kebijakan untuk mengendalikan jumlah penduduk, indikatornya adalah **Angka Kelahiran Total (TFR)** yang mencatat jumlah rata-rata anak yang dilahirkan oleh seorang wanita selama masa hidupnya. Target tahun 2025 adalah **2.08** indeks Pembangunan keluarga menunjukkan adanya peningkatan dalam kualitas kehidupan keluarga. menunjukkan bahwa kondisi keluarga secara keseluruhan lebih baik.

REALISASI KEUANGAN SD. TRIWULAN I 2025

No	URAIAN	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH / BERKURANG	%
A	BELANJA OPERASI	**Rp. 45.582.839.657**	**Rp. 44.646.653.910**	**(Rp. 936.185.747)**	2,05 %
1.	Belanja Pegawai	Rp. 12.567.300.010	Rp. 11.958.276.683	(Rp. 609.023.327)	4,84 %
2.	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 33.015.539.647	Rp. 32.688.377.227	(Rp. 327.162.420)	0,99 %
B	Belanja Modal	**Rp. 2.217.449.228**	**Rp. 2.320.640.428**	**p. 103.191.200**	4,65 %
1.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp. 936.504.228	Rp. 987.911.428	Rp. 51.407.200	5,48 %
2.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp. 1.264.500.000	Rp. 1.312.460.000	Rp. 47.960.000	3,79 %
3.	Belanja Modal Aset Lainnya	Rp. 16.445.000	Rp. 20.269.000	Rp. 3.824.000	23,25 %
	JUMLAH BELANJA	**Rp. 47.800.288.885**	**Rp. 46.967.294.338**	**(Rp. 832.994.547)**	**1,74 %**

2.1 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyelenggarakan 1 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, 4 program dan 16 kegiatan dan 89 Sub Kegiatan.

Pengukuran kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tangerang didasarkan pada 3 sasaran strategis dan 3 Indikator kinerja utama dengan capaian sasaran sebagai tolak ukur keberhasilan atau kegagalannya sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel Kendali Perubahan Renja Tahun 2025

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tangerang

PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TOTAL PAGU MURNI 2025	TOTAL PAGU PERUBAHAN 2025	SELISIH PAGU MURNI DAN PERUBAHAN 2025	REALISASI S.D TW.II 2025	ALASAN PERUBAHAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**19.305.598.913**	**19.252.064.688**	**18.314.863.812**	**8.229.039.359**	
2.14.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
2.14.01.2.0107 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	110.250.400	115.176.350	4.925.950	160.864.830	Peningkatan kualitas dan cakupan evaluasi kinerja.
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.567.300.010	11.958.276.683	- 609.023.327	6.123.025.244	Menyesuaikan perubahan formasi dan kebijakan penggajian tahun 2025
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**19.305.598.913**	**19.252.064.688**	**18.314.863.812**	**8.229.039.359**	
2.14.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					
2.14.01.2.0509 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	46.400.000	52.200.000	5.800.000	-	Penambahan jumlah peserta dan jenis pelatihan.
2.14.01.2.0511 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	129.094.860	134.494.860	5.400.000	-	Penambahan frekuensi bimbingan teknis.
2.14.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah					

2.14.01.2.0602 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	505.725.600	536.128.800	30.403.200	**562.958.000,00**	Penambahan kebutuhan peralatan kantor akibat penambahan staf.
2.14.01.2.0604 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	116.900.200	127.880.200	10.980.000	**138.248.500**	Kenaikan harga bahan logistik dan peningkatan kebutuhan.
2.14.01.2.0605 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	30.961.610	37.681.610	6.720.000	28.949.960	Penambahan volume cetak dokumen kebijakan.
2.14.01.2.0608 Fasilitasi Kunjungan Tamu	103.669.500,00	112.132.000,00	8.662.500,00	**53.909.500**	Peningkatan frekuensi kunjungan tamu penting.
2.14.01.2.0609 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	97.070.000,00	95.093.800,00	- 1.976.200,00	**10.875.000**	Pengurangan anggaran akibat penerapan rapat hybrid (daring-luring).
2.14.01.2.0611 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	134.322.000,00	189.946.000,00	55.624.000,00	**51.000.000**	Penambahan dana untuk pengembangan sistem elektronik dan peningkatan kapasitas server.
2.14.01.2.0605 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.865.000,00	2.873.150,00	8.150,00		Penyesuaian harga bahan cetak.
2.14.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
2.14.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
2.14.01.2.0802 Penyediaan Jasa	866.086.000,00	865.986.000,00	- 100.000,00	54.356.236	Penghematan biaya

Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					langganan jasa komunikasi.
2.14.01.2.0804 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	377.086.000,00	255.490.000,00	- 121.596.000,00	**367.378.500**	Efisiensi anggaran layanan umum kantor.
2.14.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
2.14.01.2.0901 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	219.134.456,00	207.868.706,00	- 11.265.750,00	**84.670.999**	Pengurangan biaya pemeliharaan kendaraan dinas jabatan.
2.14.01.2.0902 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	287.258.744,00	273.853.248,00	- 13.405.496,00	83.210.000	Pengurangan biaya pemeliharaan kendaraan operasional.
2.14.01.2.0909 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	498.644.000,00	567.604.000,00	68.960.000,00	175.336.900	Penambahan anggaran untuk rehabilitasi gedung kantor yang mendesak.
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK **2.14.02.2.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**	**19.305.598.913**	**19.252.064.688**	**18.314.863.812**	**8.229.039.359**	
2.14.02.2.0102 Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	88.107.000	288.107.000	+200.000.000	51.680.000	Penyusunan Peta Jalan Kependudukan
2.14.02.2.0113 Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	11.610.000,00	70.009.000,00	58.399.000,00	0	Penambahan anggaran untuk memperluas jangkauan sosialisasi dan intensitas kegiatan.
2.14.02.2.0122 Pelaksanaan penyediaan	69.716.000,00	83.155.200,00	13.439.200,00	**106.603.250**	Penambahan kebutuhan

data dan sosialisasi Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)					sumber daya dalam pengumpulan data dan sosialisasi IPBK.
2.14.02.2.0123 Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana	153.572.200,00	117.123.000,00	- 36.449.200,00	**106.603.240**	Efisiensi anggaran akibat perubahan skala rapat dan penyesuaian metode pelaksanaan.
2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	**12.850.924.365**	**10.579.581.087**	**10.523.928.091**	**4.044.049.790**	
2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal					
2.14.03.2.0108 Pengendalian Program KKBPK	214.853.282,22	214.853.200,00	- 82,22	**112.724.822**	
2.14.03.2.0112 Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	240.650.076,00	434.550.076,00	193.900.000,00	216.567.120	Pokir – Penyusunan Buku Saku KIE Bangga Kencana & Penerbitan 5.000 buku
2.14.03.2.0113 Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	313.984.240,00	478.984.240,00	165.000.000,00	172.641.200	Pokir – KIE Program Bangga Kencana berbasis kearifan ocal (Kencana) di 10 kecamatan
2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota					
2.14.03.2.0306 Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	114.427.000,78	114.427.000,00	- 0,78	**111.565.000**	Penurunan harga sarana penunjang sehingga anggaran dikurangi.
2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah					

Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB					
2.14.03.2.0402 Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	294.428.440,00	297.318.230,00	2.889.790,00	179.365.000	Penambahan anggaran untuk meningkatkan sinergi program lintas sektor.
2.14.03.2.0405 Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	2.638.471.780,00	2.708.671.400,00	70.199.620,00	348.750.780	Penambahan dana untuk perluasan cakupan program DASHAT.
2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	**16.532.739.110**	**16.230.185.419**	**-302.553.691**	**7.650.372.760**	
2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga					
2.14.04.2.0114 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	152.700.350,00	133.700.350,00	- 19.000.000,00	**-**	Pengurangan anggaran karena perubahan strategi kegiatan yang lebih efisien .
2.14.04.2.0115 Pembentukan dan operasional Sekolah Lansia di Kelompok BKL	195.287.200,00	306.167.600,00	110.880.400,00	66.280.000	Penambahan anggaran untuk pembentukan sekolah lansia di lokasi baru.
2.14.04.2.02 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga					
2.14.04.2.0202 Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan	73.279.630,00	95.329.630,00	22.050.000,00	**0**	Penambahan dana untuk meningkatkan

dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)					peran aktif mitra kerja.
2.14.03.2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)					
2.14.03.2.0206 Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	270.282.000,00	375.401.000,00	105.119.000,00	133.451.000	Penambahan dana untuk meningkatkan cakupan penyuluhan lapangan.
JUMLAH	**(Rp. 47.800.288.885)**	**(Rp. 46.967.294.338)**	**832.994.547,00**	**20.430.359.349**	

Tabel T-C.29
Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat daerah dan pencapaian renstra Perangkat daerah Triwulan I tahun 2025 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tangerang
MONEV TAHUN 2025 TRIWULAN 1
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Capaian (%)	Realisasi Fisik Kegiatan (%)	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Satuan	Target indikator	Realisasi Indikator	Capaian (%)	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5=(4/3)*100	6	7	8	9	10	11=(10/9)*100	12
2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**										
2.14.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	18.349.849.112	4.246.203.156	23.14 %	49.42 %	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	%	100	100	100.00 %	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	326.582.680	21.827.800	6.68 %	18.01 %	persentase dokumen perencanaan dan evaluasi lengkap tepat waktu	%	25	25	100.00 %	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.01.2.01.0001	*Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	128.485.300	12.921.000	10.06 %	10.06 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	-	-	0.00 %	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.01.2.01.0002	*Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*	32.684.400	0	0.00 %	0.00 %	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	-	-	0.00 %	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.01.2.01.0003	*Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD*	11.212.000	2.015.000	17.97 %	18.53 %	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	-	-	0.00 %	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.01.2.01.0004	*Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD*	11.262.000	0	0.00 %	0.00 %	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	-	-	0.00 %	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

2.14.01.2.01.0005	*Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD*	11.182.780	0	0.00 %	0.00 %	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	1	100.00 %	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.01.2.01.0006	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	19.765.850	6.891.800	34.87 %	41.53 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	1	1	100.00 %	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.01.2.01.0007	*Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	111.990.350	0	0.00 %	1.90 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	-	-	0.00 %	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.870.982.810	2.949.247.561	24.84 %	28.95 %	persentase dukungan dan laporan keuangan sesuai ketentuan	%	25	25	100.00 %	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.01.2.02.0001	*Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	11.801.181.810	2.949.247.561	24.99 %	28.95 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	36	36	100.00 %	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.01.2.02.0005	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	33.737.000	0	0.00 %	0.00 %	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen	-	-	0.00 %	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.01.2.02.0007	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD*	28.995.000	0	0.00 %	0.00 %	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dokumen	4	4	100.00 %	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.01.2.02.0008	*Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran*	7.069.000	0	0.00 %	0.00 %	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	-	-	0.00 %	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	70.111.350	3.824.400	5.45 %	62.50 %	persentase administrasi BMD sesuai ketentuan	%	25	25	100.00 %	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.01.2.03.0001	*Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD*	39.317.600	3.824.400	9.73 %	100.00 %	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	1	100.00 %	Dinas Pengendalian Penduduk dan

											Keluarga Berencana
2.14.01.2.03.0004	*Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD*	25.945.140	0	0.00 %	25.00 %	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Dokumen	-	-	0.00 %	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.01.2.03.0005	*Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD*	4.848.610	0	0.00 %	0.00 %	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dokumen	-	-	0.00 %	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	300.247.170	89.520.000	29.82 %	100.00 %	Meningkat nya kompetensi SDM DPPKB	%	20	20	100.00 %	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.01.2.05.0002	*Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya*	90.468.000	89.520.000	98.95 %	100.00 %	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Set	2	2	100.00 %	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.01.2.05.0009	*Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi*	46.400.000	0	0.00 %	0.00 %	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	-	-	0.00 %	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.01.2.05.0010	*Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan*	28.884.310	0	0.00 %	0.00 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	-	-	0.00 %	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.01.2.05.0011	*Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*	134.494.860	0	0.00 %	0.00 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	-	-	0.00 %	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.263.658.786	678.113.650	53.66 %	68.68 %	persentase pemenuhan administrasi umum perkantoran	%	25	25	100.00 %	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.01.2.06.0001	*Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*	11.194.500	11.194.500	100.00 %	100.00 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Set	1	1	100.00 %	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

2.14.01.2.06.0001	*Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*	2.299.200	2.290.500	99.62 %	100.00 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (UPT)	Set	1	1	100.00 %	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.01.2.06.0002	*Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	505.725.600	478.308.000	94.58 %	100.00 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(OPD)	Set	1	1	100.00 %	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.01.2.06.0002	*Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	85.232.016	0	0.00 %	0.00 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(UPT)	Set	-	-	0.00 %	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.01.2.06.0003	*Penyediaan Peralatan Rumah Tangga*	22.118.200	21.602.000	97.67 %	100.00 %	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (OPD)	Set	1	1	100.00 %	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.01.2.06.0003	*Penyediaan Peralatan Rumah Tangga*	15.628.410	0	0.00 %	0.00 %	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (UPT)	Set	-	-	0.00 %	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.01.2.06.0004	*Penyediaan Bahan Logistik Kantor*	125.360.200	110.217.500	87.92 %	100.00 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (OPD)	Set	1	1	100.00 %	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.01.2.06.0004	*Penyediaan Bahan Logistik Kantor*	27.821.040	0	0.00 %	100.00 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan(UPT)	Set	1	1	100.00 %	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.01.2.06.0005	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	30.961.610	25.509.650	82.39 %	83.33 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (OPD)	Set	1	1	100.00 %	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.01.2.06.0005	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	2.873.150	0	0.00 %	60.03 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan(UPT)	Set	1	1	100.00 %	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.01.2.06.0006	*Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan*	10.410.000	2.602.500	25.00 %	25.00 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	1	100.00 %	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

2.14.01.2.06.0008	*Fasilitasi Kunjungan Tamu*	109.932.000	26.389.000	24.00 %	26.90 %	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (OPD)	Dokumen	1	1	100.00 %	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.01.2.06.0008	*Fasilitasi Kunjungan Tamu*	1.200.000	0	0.00 %	25.00 %	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (UPT)	Dokumen	-	-	0.00 %	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.01.2.06.0009	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	130.138.000	0	0.00 %	3.87 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dokumen	1	1	100.00 %	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.01.2.06.0010	*Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD*	9.818.860	0	0.00 %	0.00 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	100	100	100.00 %	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.01.2.06.0011	*Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD*	172.946.000	0	0.00 %	0.00 %	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	-	-	0.00 %	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.600.575.502	62.310.000	3.89 %	100.00 %	Terlaksana nya Pengadaan BMD sesuai ketentuan	%	25	25	100.00 %	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.01.2.07.0005	*Pengadaan Mebel*	300.580.000	0	0.00 %	0.00 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (OPD)	Unit	85	85	100.00 %	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.01.2.07.0005	*Pengadaan Mebel*	64.322.502	62.310.000	96.87 %	100.00 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (UPT)	Unit	1	1	100.00 %	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.01.2.07.0009	*Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	1.235.673.000	0	0.00 %	0.00 %	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	-	-	0.00 %	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	938.617.960	217.088.846	23.13 %	25.56 %	persentase terpenuhi kebutuhan Jasa penunjang	%	25	25	100.00 %	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

2.14.01.2.08.0002	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	12.500.000	0	0.00 %	0.00 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (OPD)	Dokumen	-	-	0.00 %	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.01.2.08.0002	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	182.877.960	31.481.346	17.21 %	25.00 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (UPT)	Dokumen	-	-	0.00 %	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.01.2.08.0004	*Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	255.490.000	100.607.500	39.38 %	26.68 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Dokumen	1	1	100.00 %	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.01.2.08.0004	*Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	487.750.000	85.000.000	17.43 %	25.00 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (UPT)	Dokumen	1	1	100.00 %	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.979.072.854	224.270.899	11.33 %	25.98 %	peprsentase pemeliharaan BMD sesuai kebutuhan	%	25	25	100.00 %	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.01.2.09.0001	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan*	207.868.706	34.200.999	16.45 %	24.32 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	6	6	100.00 %	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.01.2.09.0002	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	273.853.248	19.310.000	7.05 %	15.99 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	17	17	100.00 %	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.01.2.09.0006	*Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	122.400.000	7.970.000	6.51 %	13.24 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	9	9	100.00 %	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.01.2.09.0009	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*	567.604.000	6.500.000	1.15 %	1.30 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (OPD)	Unit	-	-	0.00 %	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.01.2.09.0009	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*	169.502.900	149.789.900	88.37 %	100.00 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(UPT)	Unit	1	1	100.00 %	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

2.14.01.2.09.0011	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	637.844.000	6.500.000	1.02 %	1.02 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	-	-	0.00 %	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	1.237.535.600	238.616.800	19.28 %	55.93 %	Presentase rekomendasi kebijakan dalam rangka pengendalian kependudukan (hasil sinkronisasi dan survey) yang ditindaklanjut	%	25	25	100.00 %	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
						Persentase Rumah Data di Kampung KB yang memenuhi klasifikasi Paripurna	%	7	7	100.00 %	
						Persentase ketersediaan pemetaan dan sistem infomasi pengendalian kependudukan	%	25	25	100.00 %	
2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	443.524.200	93.248.000	21.02 %	36.75 %	Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dari kegiatan advokasi, koordinasi dan sinkronisasi Program KKBPK	Dokumen	-	-	0.00 %	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.02.2.01.0002	*Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota*	88.107.000	0	0.00 %	0.00 %	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	-	-	0.00 %	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.02.2.01.0013	*Sosialisasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan Kepada Pemangku Kepentingan*	79.200.000	0	0.00 %	0.00 %	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Kelompok	20	20	100.00 %	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.02.2.01.0017	*Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga*	8.910.000	0	0.00 %	0.00 %	Jumlah pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	kali	1	-	0.00 %	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.02.2.01.0019	*Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal*	44.019.000	7.889.000	17.92 %	17.92 %	Jumlah Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	Sekolah	20	-	0.00 %	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.02.2.01.0022	*Pelaksanaan penyediaan data dan sosialisasi Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)*	69.716.000	0	0.00 %	0.00 %	Jumlah Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan	Dokumen	-	-	0.00 %	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

2.14.02.2.01.0023	*Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana*	153.572.200	85.359.000	55.58 %	55.58 %	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Dokumen	-	-	0.00 %	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	794.011.400	145.368.800	18.31 %	65.52 %	jumlah dokumen hasil pemutakhiran data keluarga dan pengendalian lapangan	Dokumen	1	1	100.00 %	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.02.2.02.0002	*Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan*	10.030.000	10.030.000	100.00 %	100.00 %	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Dokumen	-	-	0.00 %	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.02.2.02.0005	*Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan*	71.430.000	0	0.00 %	0.00 %	Jumlah Kajian Dampak Kependudukan	Dokumen	-	-	0.00 %	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.02.2.02.0010	*Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga*	28.381.400	0	0.00 %	0.00 %	Jumlah Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang Dimanfaatkan	Dokumen	-	-	0.00 %	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.02.2.02.0011	*Penyediaan Data dan Informasi Keluarga*	116.251.000	0	0.00 %	0.00 %	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	Dokumen	-	-	0.00 %	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.02.2.02.0012	*Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga*	76.200.000	0	0.00 %	0.00 %	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Dokumen	-	-	0.00 %	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.02.2.02.0013	*Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB*	24.725.000	21.804.980	88.19 %	65.83 %	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Dokumen	-	-	0.00 %	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.02.2.02.0015	*Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain*	284.654.000	89.873.840	31.57 %	32.17 %	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk	Unit	32	32	100.00 %	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.02.2.02.0017	*Perumusan Parameter pengendalian penduduk dan KB*	43.057.000	0	0.00 %	0.00 %	Jumlah Dokumen Parameter Pengendalian penduduk dan KB yang dirumuskan	Dokumen	-	-	0.00 %	Dinas Pengendalian Penduduk dan

											Keluarga Berencana
2.14.02.2.02.0018	*Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana*	36.920.000	23.659.980	64.08 %	64.08 %	Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana	Dokumen	-	-	0.00 %	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.02.2.02.0019	*Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)*	56.268.000	0	0.00 %	0.00 %	Jumlah dokumen Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Dokumen	-	-	0.00 %	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.02.2.02.0020	*Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)*	46.095.000	0	0.00 %	0.00 %	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Dokumen	-	-	0.00 %	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	10.523.928.091	1.454.151.070	13.82 %	18.38 %	Angka prevalensi kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Rate/ mCPR) (%)	%	71.50	71.50	100.00 %	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
						Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	27.13	27.13	100.00 %	
						Persentase hasil kegiatan advokasi, penyuluhan dan pendayagunaan keluarga	%	95	95	100.00 %	
						Persentase Kampung KB yang dibina dan sesuai dengan standar penilaian	%	70	70	100.00 %	
2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	1.720.167.951	135.566.840	7.88 %	11.89 %	jumlah kegiatan pelaksanaan KIE dan pemberdayaan masyarakat kelompok Terlaksananya KIE	kali	31	31	100.00 %	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.03.2.01.0008	*Pengendalian Program KKBPK*	214.853.200	20.000.000	9.31 %	12.32 %	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	Dokumen	-	-	0.00 %	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.03.2.01.0011	*Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)*	579.638.000	41.710.000	7.20 %	9.92 %	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Dokumen	29	29	100.00 %	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

2.14.03.2.01.0012	*Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang*	289.550.076	5.734.000	1.98 %	2.82 %	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Dokumen	-	-	0.00 %	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.03.2.01.0013	*Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal*	313.984.240	62.468.000	19.90 %	32.64 %	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	Dokumen	1	1	100.00 %	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.03.2.01.0014	*Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja*	322.142.435	5.654.840	1.76 %	1.76 %	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Kelompok	2	2	100.00 %	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	1.631.905.000	215.984.000	13.24 %	11.40 %	Jumlah peserta PKB/PLKB yang didayagunakan	Orang	58	58	100.00 %	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.03.2.02.0002	*Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB*	434.504.000	48.664.000	11.20 %	12.85 %	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia	Unit	14	14	100.00 %	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.03.2.02.0004	*Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)*	822.000.000	164.400.000	20.00 %	20.00 %	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Orang	822	822	100.00 %	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.03.2.02.0006	*Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)*	375.401.000	2.920.000	0.78 %	1.35 %	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Dokumen	1	1	100.00 %	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	2.824.928.170	548.303.000	19.41 %	25.70 %	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Dokumen	-	-	0.00 %	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

2.14.03.2.03.0001	*Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya*	230.654.960	56.394.000	24.45 %	25.09 %	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Dokumen	-	-	0.00 %	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.03.2.03.0003	*Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)*	1.885.400.000	407.099.000	21.59 %	22.14 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Orang	1311	1311	100.00 %	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.03.2.03.0005	*Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB*	11.989.460	0	0.00 %	0.00 %	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KBdokumen	Dokumen	-	-	0.00 %	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.03.2.03.0006	*Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB*	114.427.000	0	0.00 %	0.00 %	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	Unit	-	-	0.00 %	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.03.2.03.0007	*Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB*	13.078.500	0	0.00 %	0.00 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	Orang	-	-	0.00 %	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.03.2.03.0008	*Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya*	286.500.000	84.810.000	29.60 %	29.86 %	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Dokumen	1	1	100.00 %	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.03.2.03.0010	*Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi*	49.500.000	0	0.00 %	0.00 %	Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Orang	-	-	0.00 %	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.03.2.03.0011	*Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak*	153.334.000	0	0.00 %	0.00 %	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Dokumen	-	-	0.00 %	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.03.2.03.0013	*Peningkatan Kesertaan KB Pria*	42.819.250	0	0.00 %	0.00 %	Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria	Orang	-	-	0.00 %	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.03.2.03.0016	*Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan*	37.225.000	0	0.00 %	0.00 %	Jumlah orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	Orang	-	-	0.00 %	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	4.346.926.970	554.297.230	12.75 %	26.23 %	Jumlah Kampung KB yang dibentuk dan dibina	Lokasi	158	158	100.00 %	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.03.2.04.0002	*Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB*	297.318.230	126.993.000	42.71 %	49.02 %	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Dokumen	-	-	0.00 %	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.03.2.04.0004	*Pembinaan Terpadu Kampung KB*	305.745.700	99.120.450	32.42 %	40.56 %	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	Dokumen	1	1	100.00 %	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.03.2.04.0005	*Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas*	2.713.471.400	291.297.780	10.74 %	11.75 %	Jumlah DASHAT di Kampung KB	Unit	3	3	100.00 %	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.03.2.04.0006	*Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas*	1.030.391.640	36.886.000	3.58 %	3.58 %	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Lokasi	158	158	100.00 %	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	16.230.185.419	2.840.326.700	17.50 %	15.11 %	Prosentase capaian kinerja pemberdayaan KKS	%	92.25	92.25	100.00 %	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
						Prosentase keluarga beresiko yang mendapat pendampingan dan ditindaklanjuti	%	94	94	100.00 %	
						Prosentase kerjasama dengan mitra kerja	%	100	100	100.00 %	
2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1.669.585.579	42.286.700	2.53 %	10.25 %	% Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang terbina dan berjalan baik	%	10	10	100.00 %	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.04.2.01.0014	*Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas*	133.700.350	0	0.00 %	0.00 %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Kelompok	-	-	0.00 %	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.04.2.01.0015	*Pembentukan dan operasional Sekolah Lansia di Kelompok BKL*	323.127.819	26.950.000	8.34 %	13.80 %	Persentase sekolah lansia yang dilaksanakan di kelompok Bina Keluarga Lansia	%	0.8	0.8	100.00 %	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

2.14.04.2.01.0018	*Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)*	130.000.000	0	0.00 %	0.00 %	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	Unit	-	-	0.00 %	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.04.2.01.0019	*Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)*	304.565.800	0	0.00 %	0.00 %	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Orang	-	-	0.00 %	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.04.2.01.0021	*Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)*	229.323.400	15.336.700	6.69 %	6.69 %	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	Dokumen	1	1	100.00 %	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.04.2.01.0025	*Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)*	28.703.920	0	0.00 %	0.00 %	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Dokumen	-	-	0.00 %	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.04.2.01.0026	*Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)*	324.000.000	0	0.00 %	0.00 %	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	Kelompok	-	-	0.00 %	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.04.2.01.0028	*Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (U*	196.164.290	0	0.00 %	0.00 %	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk	Kelompok	-	-	0.00 %	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	14.560.599.840	2.798.040.000	19.22 %	19.98 %	persentase peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kab/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarg	%	85	85	100.00 %	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

2.14.04.2.02.0001	*Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)*	76.641.840	0	0.00 %	0.00 %	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kelompok	-	-	0.00 %	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.04.2.02.0002	*Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)*	84.409.630	0	0.00 %	0.00 %	Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Dokumen	-	-	0.00 %	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.04.2.02.0003	*Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)*	37.424.630	0	0.00 %	0.00 %	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	kali	-	-	0.00 %	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.04.2.02.0004	*Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja*	324.482.100	0	0.00 %	0.00 %	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Dokumen	-	-	0.00 %	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.04.2.02.0005	*Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)*	6.218.441.640	1.234.200.000	19.85 %	19.96 %	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Dokumen	2	2	100.00 %	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.04.2.02.0006	*Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)*	7.819.200.000	1.563.840.000	20.00 %	20.00 %	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	Dokumen	2	2	100.00 %	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

2.2 Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD tahun 2025

Hasil analisis kebutuhan terdapat perubahan terhadap rancangan Perubahan RKPD. Sebagaimana tabel berikut :
Tabel T-C.31

KAB. TANGERANG
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	OKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							**49.736.191.128,00**	**47.800.288.885,00**	**46.306.512.922,00**	**-3.429.678.206,00**							**39.971.991.350,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**49.736.191.128,00**	**47.800.288.885,00**	**46.306.512.922,00**	**-3.429.678.206,00**							**39.971.991.350,00**	
	2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**							**49.736.191.128,00**	**47.800.288.885,00**	**46.306.512.922,00**	**-3.429.678.206,00**							**39.971.991.350,00**	
1.	**2.14.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Meningkatnya fungsi Administrasi DPPKB secara efektif Persentase**				**100 100 persen Persen**	**100 100 persen Persen**	**19.305.598.913,00**	**19.252.064.688,00**	**18.314.863.812,00**	**-716.404.314,00**							**18.589.194.599,00**	

			pemenuhan urusan pemerintahan																
	2.14.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*persentase dokumen perencanaan dan evaluasi lengkap tepat waktu Terpenuhinya dokumen perencanaan dan evaluasi keg sesuai ketentuan*				100 persen	100 persen	260.665.300,00	261.811.300,00	326.582.680,00	65.917.380,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Sekretariat, Bidang dan UPT		260.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	25.665.300,00	25.665.300,00	128.485.300,00	102.820.000,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantas	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningka			25.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															an korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	tkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			
	2.14.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	32.684.400,00	-17.315.600,00	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik		50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																	

			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	11.212.000,00	-3.788.000,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			15.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	11.262.000,00	-3.738.000,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba,	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan			15.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			
	2.14.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	11.182.780,00	-3.817.220,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			15.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi				4 Laporan	4 Laporan	25.000.000,00	25.000.000,00	19.765.850,00	-5.234.150,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pem			25.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

			Kinerja SKPD										Kel/ Desa		erkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	erintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik				
	2.14.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2 Laporan	115.000.000,00	116.146.000,00	111.990.350,00	-3.009.650,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			115.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

	2.14.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*persentase dukungan dan laporan keuangan sesuai ketentuan Terpenuhinya lap keuangan sesuai ketentuan*				100 persen	100 persen	11.972.787.128,00	12.651.407.010,00	11.870.982.810,00	-101.804.318,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	ASN DPPKB		11.972.787.128,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				43/12 Orang/bulan	43/12 Orang/bulan	11.888.680.128,00	12.567.300.010,00	11.801.181.810,00	-87.498.318,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			11.888.680.128,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				6 Laporan	6 Laporan	38.779.000,00	38.779.000,00	33.737.000,00	-5.042.000,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi,	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata			38.779.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															narkoba, judi, dan penyelud upan.	Kelola Pemerint ahan yang Baik			
	2.14.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwul anan/Semesteran SKPD				19 Lapor an	19 Lapor an	36.403.000,00	36.403.000,00	28.995.000,00	-7.408.000,00	Kab. Tanger ang, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	PEN DAP ATA N ASLI DAE RAH (PAD)	Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperk uat pencega han dan pembera ntasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelud upan.	Meningka tkan Penyelen ggaraan Tata Kelola Pemerint ahan yang Baik Meningka tkan Penyelen ggaraan Tata Kelola Pemerint ahan yang Baik			36.403.000,00	DINAS PENGENDALI AN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																	
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokum en	1 Dokum en	8.925.000,00	8.925.000,00	7.069.000,00	-1.856.000,00	Kab. Tanger ang, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	PEN DAP ATA N ASLI DAE RAH (PAD)	Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperk uat pencega han dan pembera ntasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelud upan.	Meningka tkan Penyelen ggaraan Tata Kelola Pemerint ahan yang Baik Meningka tkan Penyelen ggaraan Tata Kelola Pemerint ahan yang Baik			8.925.000,00	DINAS PENGENDALI AN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

	2.14.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*persentase administrasi BMD sesuai ketentuan terpenuhinya administrasi BMD*				100 persen	100 persen	155.157.350,00	96.559.500,00	70.111.350,00	-85.046.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia	ASN DPPKB		80.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	89.817.350,00	39.317.600,00	39.317.600,00	-50.499.750,00	Kab. Tangerang, Tigaraksa, Tigaraksa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia			15.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																		

			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	4 Laporan	50.220.000,00	50.196.900,00	25.945.140,00	-24.274.860,00	Kab. Tangerang, Tigaraksa, Tigaraksa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia			50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	4 Laporan	15.120.000,00	7.045.000,00	4.848.610,00	-10.271.390,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia			15.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																

			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	4 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tangerang, Tigaraksa, Tigaraksa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*persentase dukungan layanan kepegawaian lengkap tepat waktu*				100 persen 75 persen	100 persen	289.380.000,00	347.840.600,00	300.247.170,00	10.867.170,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia	ASN DPPKB		315.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai																		
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tangerang, Tigaraksa, Tigaraksa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta	Meningkatkan Pembangunan Sumber			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

			Pegawai											)	memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Daya Manusia Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia				
	2.14.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	46 Paket	100.170.000,00	90.468.000,00	90.468.000,00	-9.702.000,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia			100.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tangerang, Tigaraksa, Tigaraksa	-	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata			15.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Kelola Pemerintahan yang Baik			
	2.14.01.2.05.0007	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas																	
			Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Tangerang, Tigaraksa, Tigaraksa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				45 Orang	45 Orang	63.000.000,00	46.400.000,00	46.400.000,00	-16.600.000,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia			75.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

	2.14.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				35 Orang	35 Orang	51.150.000,00	38.512.600,00	28.884.310,00	-22.265.690,00	Kab. Tangerang, Tigaraksa, Tigaraksa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeluduan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				45 Orang	45 Orang	75.060.000,00	172.460.000,00	134.494.860,00	59.434.860,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeluduan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			75.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*persentase pemenuhan administrasi umum perkantoran Terpenuhinya dukungan administrasi umum perkantoran*				100 persen	100 persen	1.148.586.002,00	1.317.113.716,00	1.263.658.786,00	115.072.784,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelen	Administrasi DPPKB		997.548.082,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

														pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	ggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik				
	2.14.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	20.520.000,00	11.194.500,00	11.194.500,00	-9.325.500,00	Kab. Tangerang, Tigaraksa, Tigaraksa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			20.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	256.500.000,00	489.469.600,00	505.725.600,00	249.225.600,00	Kab. Tangerang, Tigaraksa, Tigaraksa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			250.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																	

			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	25.380.000,00	22.041.400,00	22.118.200,00	-3.261.800,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			25.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	18.830.000,00	116.900.200,00	125.360.200,00	106.530.200,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			5.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.14.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	30.780.000,00	41.282.350,00	30.961.610,00	181.610,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeluduan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			30.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	10.410.000,00	10.410.000,00	10.410.000,00	0,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang			8.600.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

														penyeluduan.	Baik				
	2.14.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				150 Laporan	150 Laporan	136.800.000,00	138.600.000,00	109.932.000,00	-26.868.000,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeluduan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	350.703.000,00	199.625.000,00	130.138.000,00	-220.565.000,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeluduan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			350.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

	2.14.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				700 Dokumen	700 Dokumen	50.220.000,00	13.210.000,00	9.818.860,00	-40.401.140,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeluduan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	60.210.002,00	137.180.000,00	172.946.000,00	112.735.998,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeluduan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			60.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Terlaksananya Pengadaan BMD sesuai ketentuan Tersedianya sarana prasarana penunjang*				100 persen 4 jenis	100 persen 4 jenis	2.787.348.493,00	1.600.575.502,00	1.600.575.502,00	-1.186.772.991,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Menin	Barang Milik Daerah		2.786.812.613,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeluduan.	gkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia				
	2.14.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	400.119.480,00	0,00	0,00	-400.119.480,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeluduan.	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia			400.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	400.316.400,00	0,00	0,00	-400.316.400,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludu	Meningkatkan Pembangunan Sumb			400.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

														pan.	er Daya Manusia				
	2.14.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				60 Unit	60 Unit	250.100.000,00	300.580.000,00	300.580.000,00	50.480.000,00	Kab. Tangerang, Tigaraksa, Tigaraksa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeluduan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			250.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				3 Unit	2 Unit	1.500.000.000,00	1.235.673.000,00	1.235.673.000,00	-264.327.000,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeluduan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			1.500.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)						PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				20 Unit	20 Unit	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Tangerang, Tigaraksa, Tigaraksa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			150.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*persentase terpenuhi kebutuhan Jasa penunjang Tersedianya Jasa penunjang Perangkat Daerah*				100 persen	100 persen	953.629.840,00	1.065.552.960,00	938.617.960,00	-15.011.880,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Jasa Penunjang Operasi Dinas		486.364.176,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		

	8.0001																	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	27.000.000,00	0,00	0,00	-27.000.000,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik		26.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	12.420.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	80.000,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik		12.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	257.944.000,00	377.086.000,00	255.490.000,00	-2.454.000,00	Kab. Tangerang, Tigaraksa, Tigaraksa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperk	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang			257.944.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															uat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik				
	2.14.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*persentase pemeliharaan BMD sesuai kebutuhan Terlaksanany a pemeliharaan BMD*				100 persen	100 persen	1.738.044.800,00	1.911.204.100,00	1.944.087.554,00	206.042.754,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Barang Milik Daerah PD		1.690.682.600,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	2 Unit	226.458.000,00	219.134.456,00	207.868.706,00	-18.589.294,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			318.960.800,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		

	9.0002																	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				32 Unit	32 Unit	335.986.800,00	287.258.744,00	273.853.248,00	-62.133.552,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik		306.721.800,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	15 Unit	122.400.000,00	122.400.000,00	122.400.000,00	0,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik		15.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	500.000.000,00	498.644.000,00	567.604.000,00	67.604.000,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperk	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang			500.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															uat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik				
	2.14.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipeliharaa/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	402.000.000,00	614.264.000,00	637.844.000,00	235.844.000,00	Kab. Tangerang, Tigaraksa, Tigaraksa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			400.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	AAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	**2.14.02**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**Persentase ketersediaan pemetaan dan sistem infomasi pengendalian kependudukan**				**100 Persen**	**85 Persen**	**1.702.740.000,00**	**1.435.904.000,00**	**1.237.535.600,00**	**-188.531.300,00**							**1.514.208.700,00**	
	2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	*Jumlah Dokumen Rekomendasi Kebijakan dalam rangka pengendalian kependudukan dari hasil pemetaan data dan koordinasi KKBPK*				103 orang 1 kali 20 sekolah 2 KAli 4 Kegiatan	4 Dokumen	490.158.000,00	468.575.000,00	443.524.200,00	-46.633.800,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia	OPD dan Lintas Sektor Terkait		266.180.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.0002	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota																		

			Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/ Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	160.592.000,00	104.969.000,00	88.107.000,00	-72.485.000,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia			99.720.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.0013	Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan																	
			Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan				25 Organisasi	20 Organisasi	42.420.000,00	13.070.000,00	79.200.000,00	36.780.000,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	Meningkatkan Pembangunan Sumber			42.870.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															penyandang disabilitas.	Daya Manusia			
	2.14.02.2.01.0017	Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga																	
			Jumlah pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga				1 Kegiatan	1 Kegiatan	42.220.000,00	11.070.000,00	8.910.000,00	-33.310.000,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia			42.670.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.0019	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal																	

			Jumlah Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal				2 Kegiatan	20 Kegiatan	74.320.000,00	48.544.000,00	44.019.000,00	-30.301.000,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia			37.920.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.0022	Pelaksanaan penyediaan data dan sosialisasi Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)																	
			Jumlah Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan				1 Dokumen	1 Dokumen	139.646.000,00	80.632.000,00	69.716.000,00	-69.930.000,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	Meningkatkan Pembangunan Sumber			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															penyandang disabilitas.	Daya Manusia			
	2.14.02.2.01.0023	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana																	
			Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				9 Kegiatan	1 Kegiatan	30.960.000,00	210.290.000,00	153.572.200,00	122.612.200,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			43.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	AAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah dokumen pengolahan data kependudukan*				1 dokumen 1 Dokumen 2 dokumen	4 Dokumen	1.212.582.000,00	967.329.000,00	794.011.400,00	-418.570.600,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia	Perangkat Daerah, Kecamatan, Desa/Kelurahan, dan Masyarakat		1.248.028.700,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0002	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan																		

			Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan				1 Dokumen	1 Dokumen	17.024.000,00	11.830.000,00	10.030.000,00	-6.994.000,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia			17.029.300,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0005	Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan																	
			Jumlah Kajian Dampak Kependudukan				1 Dokumen	1 Dokumen	124.998.000,00	91.230.000,00	71.430.000,00	-53.568.000,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempua	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manu			125.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															n, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	sia			
	2.14.02.2.02.0010	Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga																	
			Jumlah Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang Dimanfaatkan				1 Dokumen	1 Dokumen	47.410.000,00	40.094.000,00	28.381.400,00	-19.028.600,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia			47.578.600,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga																	

			Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya				1 Dokumen	1 Dokumen	156.816.000,00	156.816.000,00	116.251.000,00	-40.565.000,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia			157.977.200,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga																	
			Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga				1 Laporan	2 Laporan	164.400.000,00	76.200.000,00	76.200.000,00	-88.200.000,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempua	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manu			164.400.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															n, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	sia			
	2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB																	
			Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB				2 Dokumen	2 Dokumen	143.670.000,00	55.425.000,00	24.725.000,00	-118.945.000,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia			143.690.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0015	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain																	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	AAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk				40 Unit	55 Unit	311.654.000,00	311.654.000,00	284.654.000,00	-27.000.000,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia				315.920.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0017	Perumusan Parameter pengendalian penduduk dan KB																		

			Jumlah Dokumen Parameter Pengendalian penduduk dan KB yang dirumuskan				1 Dokumen	1 Dokumen	74.990.000,00	62.645.000,00	43.057.000,00	-31.933.000,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia			75.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0018	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana																	
			Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana				1 Laporan	1 Laporan	47.140.000,00	47.140.000,00	36.920.000,00	-10.220.000,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia			76.959.700,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

														dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	2.14.02.2.02.0019	Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)																	
			Jumlah dokumen Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)				1 Dokumen	1 Dokumen	59.286.000,00	57.385.000,00	56.268.000,00	-3.018.000,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia			59.310.300,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0020	Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)																	

			Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga				1 Dokumen	1 Dokumen	65.194.000,00	56.910.000,00	46.095.000,00	-19.099.000,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia			65.163.600,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
3.	**2.14.03**	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**-**				**7095 Persen persen**	**-**	**12.850.924.365,00**	**10.579.581.087,00**	**10.523.928.091,00**	**-432.725.579,00**							**12.418.198.786,00**	
	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	*jumlah kegiatan pelaksanaan KIE dan pemberdayaan masyarakat kelompok Terlaksananya KIE dan pemberdayaan kelompok masyarakat dalam program Bangga Kencana*				115 kegiatan	115 kegiatan	1.877.700.600,00	1.777.795.743,00	1.720.167.951,00	-157.532.649,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia	masyarakat dan kampung KB		1.946.368.430,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

														perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	2.14.03.2.01.0008	Pengendalian Program KKBPK																	
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK			3 Laporan	1 Laporan	239.784.000,00	239.783.710,00	214.853.200,00	-24.930.800,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia		240.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang																	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	AAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang				2 Dokumen	2 Dokumen	445.338.350,00	248.130.767,00	289.550.076,00	-155.788.274,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia			445.338.430,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal																		

			Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan				4 Dokumen	4 Dokumen	430.498.250,00	349.198.020,00	313.984.240,00	-116.514.010,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia		500.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja																	
			Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja				6 Organisasi	2 Organisasi	325.630.000,00	361.045.246,00	322.142.435,00	-3.487.565,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z),	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia		326.030.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

														dan penyandang disabilitas.					

	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesertaan KB Pria* *Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB* *Jumlah laporan dukungan operasional pelayanan kb bergerak* *Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya* *Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan*				268 kegiatan 2 laporan	108 orang 1 Dokumen 225 orang 2 Dokumen 34 orang 3 Dokumen 3 Jenis 5954 orang 80 orang	2.961.739.425,00	2.873.111.000,00	2.824.928.170,00	-136.811.255,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia	Fasilitas Pelayanan Kesehatan		2.936.018.532,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

			Jejaringnya *Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)* *Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB* *Jumlah Orang yang Mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran* *Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi* *Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB*																	
	2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya																		

			Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				2 Laporan	2 Laporan	238.978.000,00	231.000.000,00	230.654.960,00	-8.323.040,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia			239.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)																	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)				8590 Orang	5954 Orang	2.117.640.000,00	1.885.400.000,00	1.885.400.000,00	-232.240.000,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z),	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia			2.117.699.900,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

															dan penyandang disabilitas.					
	2.14.03.2.03.0005	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB																		

2.3 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan 2025 ini berdasarkan usulan masyarakat khusus penentuan perumusan program dan kegiatan Kelompok Kerja berkenaan dengan kualitas penduduk yang berkaitan dengan status kesehatan dan angka kematian, Musrenbang SKPD tingkat Provinsi dan musrenbang kabupaten/kota serta mengakomodir usulan dari Kecamatan dan Kelurahan/Desa. Beberapa isu strategis peningkatan kesejahteraan keluarga sebagaimana yang tertuang dalam Visi dan Misi Bupati Tangerang Periode 2025-2026, yang harus mendapat perhatian khusus adalah Keluarga Berencana dan Keluarga diperlukan penguatan program dan kegiatan melalui penajaman pada tujuan dan sasaran srategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang harus bermuara pada Isu Srategis Kabupaten Tangerang yang diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi DPPKB di masa tiga tahun mendatang.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayan Kabupaten Tangerang Tahun 2011 – 2031. Perda tersebut ditetapkan untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Tangerang dengan mendasarkan pada rencana struktur dan pola ruang wilayah.

Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan dokumen yang disusun ditujukan untuk memastikan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pembangunan suatu wilayah, serta penyusunan kebijakan dan program pemerintah. Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 1 (angka 10) disebutkan bahwa Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan "rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program". Penyusunan KLHS memberi kontribusi terhadap proses pengambilan keputusan agar keputusan yang diambil berorientasi pada keberlanjutan dan lingkungan hidup, melalui beberapa aspek sebagai berikut:

a. identifikasi efek atau pengaruh lingkungan yang akan timbul;
b. mempertimbangkan alternatif-alternatif yang ada, termasuk opsi praktek- praktek pengelolaan lingkungan hidup yang baik;
c. antisipasi dan pencegahan terhadap dampak lingkungan pada sumber persoalan;
d. peringatan dini atas dampak kumulatif dan resiko global yang akan muncul;
e. aplikasi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Selaras dengan prinsip KLHS tersebut, DPPKB sebagai perangkat daerah yang memiliki fungsi Merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan urusan pemerintahan Bidang Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana yang menjadi kewenangan daerah perlu memperhatikan hasil kajian KLHS yang dinilai memiliki dampak terhadap lingkungan hidup dan berpotensi berpengaruh terhadap pencapaian target dan sasaran yang direncanakan. Beberapa permasalahan yang dihadapi dipengaruhi oleh aspek kajian lingkungan hidup serta isu pembangunan berkelanjutan strategis prioritas di Kabupaten Tangerang

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Maksud dari dibuatnya Rencana kerja Perubahan (RENJA) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tangerang Tahun 2025 adalah untuk menentukan arah pelaksanaan pembangunan serta sebagai acuan atau pedoman dalam perencanaan kegiatan selama kurun waktu 1 (satu) tahun yang sesuai dengan Rencana Kinerja Pembangunan Daerah Periode 2025-2026. Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Dinas Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tangerang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2025.

Misi I Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang : *Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia Kabupaten Tangerang Yang Mandiri, Berdaya Saing Tinggi dan Berakhlak Mulia.* Dikaitkan dengan Misi I RPD tahun 2025-2026, DPPKB sebagai unsur penunjang pelayanan kesehatan dan yang menjalankan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, maka fungsi dan tugas DPPKB :

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal Kinerja		Target Capaian			Kondisi Akhir
						2022*	2023**	2025	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk	Meningkatnya Kinerja Pengendalian Penduduk	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)	Rata-rata jumlah anak yang dilahirkan seorang wanita selama masa usia subur/reproduksiny a	Persen	2.13	2,10	2.08	2.07	2.05	2.05
		Meningkatnya Kualitas Keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga	indeks pengukuran kualitas keluarga yang dilakukan melalui tiga dimensi yaitu dimensi ketenteraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga	Persen	54.12	59,30	63,46	67,24	71.06	71.06
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD	Nilai AKIP	Nilai hasil evaluasi terhadap pelaksanaan akuntabilitas kinerja PD yang dilaksanakan Inspektorat	Nilai	78.72	78.80	79.60	80.20	80.40	80.40

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal Kinerja		Target Capaian			Kondisi Akhir
					2022*	2023**	2025	2025	2026	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk	Meningkatnya Kinerja Pengendalian Penduduk	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)	Rata-rata jumlah anak yang dilahirkan seorang wanita selama masa usia subur/reproduksinya	Persen	2,13	2,10	2,08	2,07	2,05	2,05
	Meningkatnya Kualitas Keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga	indeks pengukuran kualitas keluarga yang dilakukan melalui tiga dimensi yaitu dimensi ketenteraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga	Persen	54,12	59,30	63,46	67,24	71,06	71,06
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD	Nilai AKIP	Nilai hasil evaluasi terhadap pelaksanaan akuntabilitas kinerja PD yang dilaksanakan Inspektorat	Nilai	78.72	78.80	79.60	80.20	80.40	80.40

3.3 Program dan Kegiatan

Faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tangerang berusaha memberikan pelayanan dibidang Keluarga Berencana. Dalam upaya pemberian layanan pada masyarakat masih terdapat permasalahan yang disebabkan adanya factor penghambat. Namun demikian terdapat factor pendorong yang berkontribusi positif dalam perbaikan layanan. Permasalahan, factor penghambat dan pendorong dapat dilihat pada table berikut :

MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1 Belum tersedianya database kependudukan berbasis Keluarga hasil pendataan Keluarga	- Belum Optimalnya sinergitas perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan data kependudukan	- Belum terimplementasinya satu data kependudukan untuk perencanaan pembangunan
	- Belum adanya pemanfaatan NIK pada database Kependudukan berbasis Keluarga hasil pendataan Keluarga	- Belum optimalnya penyediaan data kependudukan berbasis NIK
	- Belum optimalnya pengelolaan sistem informasi kependudukan	- Belum adanya pemetaan data kependudukan
2 Permasalahan kependudukan belum menjadi isu strategis dalam pembangunan	- Masih rendahnya pemahaman stakeholder dan masyarakat tentang kependudukan	- Kurangnya sosialisasi dan terbatasnya materi tentang pembangunan kependudukan
		- Masih adanya perbedaan persepsi mengenai pengendalian penduduk
	- Belum optimalnya penyusunan dan pemanfaatan GDPK	- Belum adanya dasar hukum kebijakan GDPK untuk pengendalian penduduk
		- Belum optimalnya pemanfaatan GDPK sehingga pelaksanaannya tidak aplikatif
	- Belum teridentifikasinya masalah dampak kependudukan	- Kurangnya kapasitas SDM dalam menemukenali dampak kependudukan
		- Belum optimalnya koordinasi dalam pengendalian dampak kependudukan
	- Kurangnya peran serta organisasi kemasyarakatan dalam sosialisasi pembangunan kependudukan	- Terbatasnya kapasitas dan kapabilitas kelembagaan dalam pembangunan kependudukan
		- Terbatasnya jumlah bimbingan teknis pembangunan kependudukan yang dilakukan
3 Belum optimalnya pencapaian indikator kinerja KB	- Kurang optimalnya koordinasi dan pembinaan ber-KB antar program dan sektoral	- Masih terdapatnya sikap ego program/ sektoral dalam pelaksanaan pembinaan ber-KB
		- Belum adanya keterpaduan dan kolaborasi pelaksanaan program KB
		- Belum ada SOP mekanisme pelaksanaan koordinasi dan

		pembinaan KB
	- Belum optimalnya advokasi dan KIE KB	- Belum optimalnya data dan pemetaan sasaran dalam melakukan advokasi
		- Kurangnya strategi, desain program dan inovasi dalam pelaksanaan advokasi dan KIE
		- Belum optimalnya koordinasi dalam pelaksanaan advokasi, promosi dan KIE
		- Kurangnya kualitas dan kuantitas SDM dalam melaksanakan advokasi dan KIE
	- Kurang optimalnya pelayanan ber-KB	- Belum optimalnya pendayagunaan mitra kerja dalam pelayanan KB
		- Belum optimalnya sarana dan prasarana penunjang dalam pelayanan KB
		- Belum tersedianya sistem pencatatan dan pengendalian hasil pelayanan ber-KB
		- Kurangnya kapasitas PKB/PLKB/Kader untuk meningkatkan penggunaan alat kontrasepsi di masyarakat
4 Belum optimalnya pencapaian indikator kinerja pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera	- Belum optimalnya pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan kelompok BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan UUPKS	- Belum tersedianya data dan pemetaan sasaran kelompok pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera
		- Belum optimalnya koordinasi lintas program dan lontas sektoral dalam pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan kelompok sasaran K3
	- Belum optimalnya advokasi, promosi dan KIE dalam pembinaan dan pemberdayaan kelompok BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan UUPKS	- Kurangnya strategi, desain program dan inovasi advokasi dan KIE dalam pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan kelompok sasaran K3
		- Kurangnya kapasitas SDM dalam pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan kelompok sasaran K3
	- Kurangnya sarana prasarana dan dukungan operasional pembinaan dan pemberdayaan kelompok BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan UUPKS	- kurangnya data sasaran untuk perencanaan sarpras dan dukungan operasional dalam pembinaan dan pemberdayaan kelompok sasaran K3
		- Belum optimalnya keterpaduan dalam pelaksanaan program kegiatan pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera
	- Belum optimalnya Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dalam pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera	- Belum optimalnya Pendayagunaan Organisasi Kemasyarakatan dalam pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera
		Kurangnya peningkatan kapasitas Organisasi

		- Kemasyarakatan dalam pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera
	- Terbatasnya akses keluarga dan masyarakat untuk mendapatkan informasi dan konseling ketahanan keluarga	Belum tersedianya Pusat informasi dan konseling - ketahanan keluarga
		- Belum optimalnya koordinasi dan keterpaduan dengan lintas sektor dalam program ketahanan keluarga

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Masih tingginya Laju Pertumbuhan Penduduk	Masih tingginya unmetneed	Belum optimalnya jejaring klinik kb
		Masih rendahnya partisipasi masyarakat terhadap MKJP	Belum optimalnya KIE MKJP di masyarakat
		kurangnya pemetaan data kependudukan	Belum optimalnya pelaporan LAMPID
			Belum optimalnya Pendataan Keluarga
			Kualitas dan kuantitas sumber dayaaparatur yang masih rendah
2	Belum optimalnya aksesdan pelayanan KB yang berkualitas	Rendahnya partisipasi masyarakatdalam ber-KB	Perubahan budaya dan pola pikir masyarakat
		Kurang optimalnya advokasi danKIE kreatif	Tidak adanya DIKLAT untuk KIE
			Kurangnya pemahaman stakeholderterhadap Program KKBPK
3	Belum Optimalnya aksespembangunan keluarga	Rendahnya Partisipasi masyarakatterhadap kegiatan POKTAN	Kurangnya biaya operasional POKTAN
		Tidak ada kontnyuitas pembinaanPOKTAN di lapangan	Belum petugas lini lapangan PLKB PNSdan Non PNS

BAB IV
PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Tangerang Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, sekaligus sebagai wujud implementasi akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah daerah.

Dokumen ini memuat evaluasi kinerja tahun sebelumnya, tujuan dan sasaran pembangunan bidang kependudukan dan KB, serta rencana program, kegiatan, indikator kinerja dan alokasi anggaran yang telah disesuaikan dengan arah kebijakan pembangunan nasional, provinsi, dan Kabupaten Tangerang.

Penyusunan Renja Perubahan ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan yang efektif, efisien, dan tepat sasaran, serta mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik, khususnya dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan keluarga, pengendalian kuantitas penduduk, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Akhirnya, pelaksanaan rencana kerja ini membutuhkan dukungan penuh dari seluruh unsur pelaksana di lingkungan DPPKB, serta sinergi yang baik dengan para pemangku kepentingan baik di tingkat daerah maupun pusat. Dengan semangat kolaborasi, diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025 dapat berjalan optimal dan memberikan dampak positif bagi masyarakat Kabupaten Tangerang.

46. Kecamatan Pakuhaji

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 272-273, Rencana Kerja yang selanjutnya disingkat dengan Renja memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dalam Permendagri No 86 Tahun 2017 Pasal 1 ayat 29, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Renja PD) merupakan dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 *(satu)* tahun.

Renja Kecamatan Pakuhaji Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan bersifat teknis operasional yang menjabarkan Renstra Kecamatan Pakuhaji Tahun 2025-2026, serta merupakan Rancangan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Pakuhaji Tahun 2025 dengan juga mengacu kepada Tema RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2026 yaitu "PEMERATAAN PEMBANGUNAN BERWAWASAN LINGKUNGAN DALAM UPAYA PENINGKATAN DAYA SAING DAERAH MELALUI KOLABORASI ANTAR SEKTOR". Oleh karena itu, Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pakuhaji diharapkan dapat mendukung dokumen Renstra Kecamatan Pakuhaji periode 2025-2026 serta mendukung Tema RKPD yang sudah ditentukan.

Renja Kecamatan Pakuhaji menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahunnya dalam 1 *(satu)* tahun anggaran. Renja Kecamatan Pakuhaji juga menjadi acuan dalam mengendalikan dan mengevaluasi pembangunan pada lingkungan Kecamatan Pakuhaji. Selain itu, Renja berperan sangat penting dalam menuntun Perangkat Daerah untuk berkonstribusi mewujudkan cita-cita dan tujuan pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengoptimalkan penggunaan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh daerah. Renja Perubaahan Kecamatan Pakuhaji berkontribusi dalam mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Tangerang berkaitan dengan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, serta Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.

Dalam menyusun Renja Kecamatan Pakuhaji terdapat beberapa proses yang harus ditempuh yaitu dari persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah,

penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah, penyusunan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah, hingga penetapan Renja Perangkat Daerah. Selain itu, dokumen Renja memiliki keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan, antara lain RPD, Renja/Resntra K/L dan Renja/Resntra provinsi/kabupaten/kota, dan Renja/Resntra Perangkat Daerah. Keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan RPD, Renja/Resntra K/L dan Renja/Resntra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja/Resntra Perangkat Daerah tersebut berupa tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Kabupaten, Peraturan Kepala Daerah Kabupaten tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, RPD Kabupaten dan memperhatikan Renja Kementerian/Lembaga, Renja PerangkatDaerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Tangerang.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatar belakangi penyusunan RKPD Tahun 2025-2026 Kabupaten Tangerang adalah:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang_undang Nomor 4 Tahun 1968 Tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 632);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
19. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
20. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
21. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
23. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara perencanaan, pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daearah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O17 Nomor 13l2);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 14);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor
    13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
30. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru;
31. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentangRencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 26);
32. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten 2010-2030;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2008 Nomor 01, Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0108);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2009 Nomor 02, Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0209);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 09 Tahun 2009 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;

36. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2009 Nomor 12);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2016 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2016 Nomor 1611);
38. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah;
39. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 33 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2023 Nomor 33).
40. Permendagri Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan dimaksudkan sebagai arahan dan pedoman bagi Perangkat Daerah untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Untuk itu maksud disusunnya Renja Perubahan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

a) Memberikan acuan resmi bagi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang sekaligus menjadi acuan dalam menentukan program dan kegiatan tahunan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Kabupaten;
b) Menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu tiga tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah;
c) Menjabarkan gambaran tentang kondisi Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang;
d) Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
e) Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat

Daerah untuk memahami, menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu tiga tahunan;

f) Mengetahui apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan organisasi guna mendukung dan memenuhi tujuan dan sasaran untuk 1 *(satu)* tahun anggaran;

g) Menyesuaikan Perubahan pada RPD Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2026.

Adapun tujuan penyusunan dokumen Renja, antara lain adalah :

a) Menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yaitu untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang dan mewujudkan cita-cita yang ingin dicapai dalam 1 *(satu)* tahun anggaran sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab yang diemban Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang;

b) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama 1 *(satu)* tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung tujuan dan sasaran kepala daerah;

c) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah selama 1 *(satu)* tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah;

d) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu 1 *(satu)* tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Bab I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan

Bab II. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Bab IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab V. PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Keberhasilan pencapaian Visi dan Misi akan sangat dipengaruhi oleh tingkat kualitas sumberdaya manusia. Karena manusia sebagai subyek pelaku pembangunan yang sangat berperan dan menentukan baik sebagai perencana, pelaksana, pengguna maupun sebagai evaluator dari hasil kegiatan pembangunan. Dengan demikian tingginya tingkat kualitas sumber daya manusia para pelaku pembangunan (masyarakat, pemerintah maupun dunia usaha) sangat diperlukan dalam upaya mencapai tujuan pembangunan. Sesuai dengan tuntutan persaingan dan perkembangan dunia di era globalisasi dimana informasi terus berkembang peningkatan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Tangerang khususnya perlu diarahkan pada upaya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang diharapkan akan mampu tumbuh, berdaya tahan dan mampu bersaing serta tumbuhnya jiwa kewirausahaan. Disisi lain evaluasi hasil perencanaan tahun yang lalu akan menambah basis data untuk merencanakan program dan kegiatan selanjutnya.

Tujuan Evaluasi

1. Menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan: melalui evaluasi maka dapat diketahui derajat pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan.
2. Mengukur tingkat efisiensi suatu kebijakan: melalui evaluasi dapat diketahui berapa biaya dan manfaat dari suatu kebijakan.
3. Mengukur tingkat keluaran: mengukur berapa besar dan kualitas pengeluaran atau output dari suatu kebijakan.
4. Mengukur dampak suatu kebijakan: evaluasi ditujukan untuk melihat dampak dari suatu kebijakan, baik dampak positif maupun negatif.
5. Untuk mengetahui apabila ada penyimpangan: untuk mengetahui adanya penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi, dengan cara membandingkan antara tujuan dan sasaran dengan pencapaian target.
6. Sebagai masukan (input) suatu kebijakan yang akan datang: untuk memberikan masukan bagi proses kebijakan ke depan agar dihasilkan kebijakan yang lebih baik.

Indikator Evaluasi

1. Efektivitas: apakah hasil yang diinginkan telah tercapai.
2. Kecukupan: seberapa jauh hasil yang telah tercapai dapat memecahkan masalah?
3. Pemerataan: apakah biaya dan manfaat didistribusikan merata kepada kelompok masyarakat berbeda?
4. Responsivitas: apakah hasil kebijakan memuat preferensi/nilai kelompok dan dapat memuaskan mereka?
5. Ketepatan: apakah hasil yang dicapai bermanfaat?
6. Kaitan antara Monitoring dan Evaluasi adalah evaluasi memerlukan hasil dari monitoring dan digunakan untuk kontribusi program.

Evaluasi Pelaksanaan Renja Perubahan Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 1.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 Triwulan II.

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan \ Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7+9	11=(10/4)
7.01	**KECAMATAN**									
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan**	100	0	0	0	0	100	100	25
7.01.01.2.01	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Ketersediaan Dokumen perencanaan dan Pelaporan**	100	0	0	0	0	100	100	25
7.01.01.2.01.01	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	0	0	0	0	5	5	1,25
7.01.01.2.01.06	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	0	0	0	0	4	4	1
7.01.01.2.01.07	Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	0	0	0	0	1	1	0,25
7.01.01.2.02	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah Kecamatan Pakuhaji**	100	0	0	0	0	100	100	25
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23	0	0	0	0	23	23	5,75

7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKP	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4	0	0	0	0	4	4	1
7.01.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah Kecamatan Pakuhaji**	100	0	0	0	0	100	100	25
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah	4	0	0	0	0	4	4	1
7.01.01.2.05	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah Kecamatan Pakuhaji**	100	0	0	0	0	100	100	25
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pegawai yang mendapatkan pakaian dinas dan kelengkapannya/Orang	78	0	0	0	0	78	78	19,5
7.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	78	0	0	0	0	78	78	19,5
7.01.01.2.06	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah Kecamatan Pakuhaji**	100	0	0	0	0	100	100	25
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5	0	0	0	0	5	5	1,25
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan/Paket	15	0	0	0	0	15	15	3,75
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kelurahan Pakuhaji	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Kelurahan Pakuhaji/Paket	10	0	0	0	0	10	10	2,5
7.01.01.2.06.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan/Paket	50	0	0	0	0	50	50	12,5
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kelurahan Pakuhaji	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Kelurahan Pakuhaji/Paket	20	0	0	0	0	20	20	5
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang	5	0	0	0	0	5	5	1,25

		Disediakan/Paket								
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5	0	0	0	0	5	5	1,25
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Kelurahan Sukatani	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5	0	0	0	0	5	5	1,25
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	0	0	0	0	12	12	3
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kelurahan Pakuhaji	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Kelurahan Pakuhaji	12	0	0	0	0	12	12	3
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4	0	0	0	0	4	4	1
7.01.01.2.08	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah Kecamatan Pakuhaji**	100	0	0	0	0	100	100	25
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	0	0	0	0	1	1	0,25
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jens jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik/Jenis	5	0	0	0	0	5	5	1,25
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kelurahan Sukatani	Jumlah jens jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kelurahan Pakuhaji/Jenis	2	0	0	0	0	2	2	0,5
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan/Laporan	12	0	0	0	0	12	12	3
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kelurahan Pakuhaji	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Kelurahan Sukatani/Laporan	12	0	0	0	0	12	12	3
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah Kecamatan Pakuhaji**	100	0	0	0	0	100	100	25
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya/Unit	5	0	0	0	0	5	5	1,25

7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan Mesin yang dipelihara secara rutin/berkala /Unit	10	0	0	0	0	10	10	2,5
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kelurahan Pakuhaji	Jumlah peralatan dan Mesin yang dipelihara secara rutin Kelurahan Pakuhaji/berkala /Unit	5	0	0	0	0	5	5	1,25
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipemelihara/rehab secara rutin/berkala/Unit	4	0	0	0	0	4	4	1
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Kelurahan Pakuhaji	Jumlah gedung kantor yang dipemelihara/rehab secara rutin/berkala Kelurahan Sukatani/Unit	2	0	0	0	0	2	2	0,5
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase pemenuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik**	100	0	0	0	0	100	100	25
7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar**	100	0	0	0	0	100	100	25
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1	0	0	0	0	1	1	0,25
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kelurahan Pakuhaji	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1	0	0	0	0	1	1	0,25
7.01.02.2.03	**Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**	**Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara**	100	0	0	0	0	100	100	25
7.01.02.2.03.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	35	0	0	0	0	35	35	8,75
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase pemenuhan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan**	100	0	0	0	0	100	100	25
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan**	100	0	0	0	0	100	100	25

7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Dokumen hasil Musrenbang	1	0	0	0	0	1	1	0,25
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1	0	0	0	0	1	1	0,25
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Persentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan**	100	0	0	0	0	100	100	25
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Kelurahan Pakuhaji	Jumlah Dokumen hasil Musrenbang	1	0	0	0	0	1	1	0,25
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana Kelurahan yang dibangun/Titik	1	0	0	0	0	1	1	0,25
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Laporan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	20	0	0	0	0	20	20	5
7.01.03.2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Persentase pemenuhan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan**	100	0	0	0	0	100	100	25
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1	0	0	0	0	1	1	0,25
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum**	100	0	0	0	0	100	100	25
7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti**	100	0	0	0	0	100	100	25
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan/Laporan	4	0	0	0	0	4	4	1
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kelurahan Pakuhaji	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kelurahan Sukatani/Laporan	4	0	0	0	0	4	4	1
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Prosentase Program Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum**	100	0	0	0	0	100	100	25

7.01.05.2.01	**Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Persentase Lembaga yang mengikuti pembinaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	100	0	0	0	0	100	100	25
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia/Orang/Kali	100	0	0	0	0	100	100	25
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan/Dokumen	4	0	0	0	0	4	4	1
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase tertib administrasi pemerintahan desa**	100	0	0	0	0	100	100	25
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persentase tertib administrasi pemerintahan desa**	100	0	0	0	0	100	100	25
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa/Laporan	12	0	0	0	0	12	12	3
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12	0	0	0	0	12	12	3
7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam rangka Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa/Desa	12	0	0	0	0	12	12	3
7.01.06.2.01.08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	12	0	0	0	0	12	12	3
7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	12	0	0	0	0	12	12	3
7.01.06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	12	0	0	0	0	12	12	3

Beradasakan Tabel diatas dapat disimpulkan sebagai berikut: Kesimpulan:

1) Melaksanakan Evaluasi Capaian Program dan Kegiatan sesuai dengan target Renstra 2025-2026;
2) Memonitoring hasil capaian program dan kegiatan pada Triwulan ke II tahun pertama sesuai realisasi fisik pelaksanaan di lapangan;
3) Melaksanakan monitoring realisasi anggaran pada triwulan II atas program dan kegiatan terutama program strategis yang dilimpahkan kepada pemerintah Kecamatan;
4) Menyusun Berita Acara Monitoring dan Evaluasi berkala Capaian Renstra 2025-2026 Kecamatan Pakuhaji kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2025 pada Triwulan II.

Kendala yang ditemukan :

1. Adanya perubahan harga satuan dilapangan sehingga perubahan pada Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah ditetapkan.

Langkah-langkah yang harus diambil :

1. Koordinasi dengan pihak ketiga untuk percepatan penyelesaian pelaksanaan kegiatan kontruksi.

2.2 **Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang, merupakan Lembaga Teknis Daerah sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah dalam perencanaan pembangunan. Pencanangan pembangunan yang berkualitas dan professional dapat menjadi wahana untuk memperbaiki pola pembangunan di tingkat daerah, sehingga daerah dapat berkiprah dengan leluasa untuk membangun daerahnya sesuai potensi dan kemampuan yang ada (potensi lokal). Di sisi lain, kondisi era globalisasi merupakan tantangan besar yang harus dan langsung dihadapi pemerintah dan masyarakat Kabupaten Tangerang. Investor asing memiliki kebebasan penuh untuk membuka usaha di manapun sesuai peruntukkannya, dan ini merupakan peluang pembangunan yang patut diraih dan dimanfaatkan dengan bijaksana.

Kecamatan Pakuhaji selaku lembaga teknis di bidang perencana harus mampu menjawab tantangan tersebut di atas. Keberhasilan suatu perencanaan dapat dilihat dari mulai proses penyampaian dengan tataran pelaksanaan/impelementasi di lapangan, sehingga akan terwujud sinergi antara perencanaan pembangunan baik ditingkat nasional, provinsi maupun kabupaten. Namun disisi lain sering berubah-ubahnya regeluasi tentang mekanisme perencanaan dari tingkat pusat akan memperlambat proses perenanaan dalam rangka menterpadukan perencanaan pembangunan nasional dan

perencanaan pembangunan daerah provinsi dan perencanaan pembangunan kabupaten/kota belum bisa secara optimal.

Melihat kondisi tersebut di atas Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang selaku Badan Perencana mencoba untuk mensinergikan proses perencanaan baik tingkat pusat, provinsi dan kabupaten dalam rangka :

a. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan.
b. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.
c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan
d. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.
e. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien,efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Kecamatan Pakuhaji dalam melaksanakan rencana kerja memiliki indikator pelayanan kinerja, adapun indikator pelayanan kinerja tersebut dijelaskan pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang Provinsi Banten

No	Indikator	Standar Pelayanan Minimal	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analis
				Tahun 2025	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2025	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	
1	Jumlah Data Nomor Induk Kependudukan yang terinput	Penginputan Data Kartu Tanda Penduduk		5280	5808	6600	0	0	6600	6864	
2	Jumlah Data Nomor Kartu Keluarga yang terinput	Penginputan Data Kartu Keluarga		5016	5544	6072	0	0	6072	6600	
3	Jumlah Data Nomor Induk Kependudukan yang terinput	Penginputan Data kartu Identitas Anak		528	792	1056	0	0	1056	1320	
4	Jumlah Surat Keterangan Pindah Datang Antar Desa dan Kecamatan dalam Satu Kabupaten yang dilayani	Surat Keterangan Pindah Datang Antar Desa dan Kecamatan dalam Satu Kabupaten		1320	1584	1848	0	0	1848	2112	
5	Jumlah Rekomendasi Ijin Pendirian/Operasional Yayasan Sosial, Organisasi Sosial dan Panti Sosial yang dilayani	Rekomendasi Ijin Pendirian/Operasional Yayasan Sosial, Organisasi Sosial dan Panti Sosial		5	5	5	0	0	5	6	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Kedudukan Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang, untuk selanjutnya disingkat Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang, merupakan Lembaga Teknis Daerah sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Camat dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang.

Isu-isu penting yang ada di Kecamatan Pakuhaji dalam penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah:

1. Penataan Organisasi;
2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;
3. Penguatan Pengawasan;
4. Penguatan Akuntabilitas;
5. Penataan tata laksana;
6. Penataan SDM Aparatur;
7. Deregulasi kebijakan;
8. Manajemen Perubahan;
9. Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah;
10. Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah.

2.4 Review Terhadap Rencana Awal RKPD

Review terhadap rancangan Awal RKPD Tahun 2025 berkaitan dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2025. Rumusan kebutuhan program dan kegiatan dilengkap dengan lokasi, indikator kinerja, besaran target/tolok ukur, dan besaran dana yang dibutuhkan.

Pada tahun anggaran 2025 review rancangan awal RKPD terhadap hasil analisis kebutuhan dapat disampaikan sebagai berikut :

1) Terdapat perbedaan Pagu Anggaran antara Renstra dan Renja karena pada saat penyusunan Renja mengikuti ketersediaan Pagu Anggaran yang diberikan pada tahun berkenaan;
2) Pada sasaran target indikator antara Renstra dan Renja seharus mengikuti dan menyesuaikan jika terdapat perubahan pagu anggaran.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Pakuhaji Tahun 2025 merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam arah kebijakan RPJPD Kabupaten Tangerang tahun 2025-2026 yang dijabarkan dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2026. Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Pakuhaji Tahun 2025 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang “Tata Cara Perencanaan,

Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah", Perbup RKPD Tahun 2025 Nomor 21 Tahun 2022, Tanggal 1 Juli 2022, Perbup Perubahan RKPD Tahun 2022 No. 30 Tahun 2022 Tanggal 20 Juli 2022, agar di dalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen perencanaan. Sejalan dengan kebijakan pemerintah Propinsi Banten, tolok ukur kinerja pembangunan dilakukan melalui pengukuran indikator makro (makro ekonomi dan makro sosial), yang menempatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai indikator keberhasilan pembangunan dan evaluasi kebijakan pembangunan.

Dalam konteks perencanaan pembangunan, Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan, melayani/memenuhi kebutuhan masyarakat.

Dibawah ini merupakan data usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2025 berdasarkan hasil Musrenbang Tingkat Kecamatan Pakuhaji :

Tabel 3
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang

No.	Prioritas	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	6	8
1	Bidang Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	Pembangunan Ruang Kelas 1 Lokal SDN Tanjakan III	Meningkatkan Kualitas Pendidikan	1Lokal	Dinas Pendidikan
2	Bidang Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	Pembangunan Gedung Poned Puskesmas Pakuhaji	Terpenuhinya Kebutuhan Layanan Persalinan Masyarakat	1 Lokal	Dinas Kesehatan
3	Bidang Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	Perluasan Gedung Puskesmas Sukatani	Peningkatan Sarana Kesehatan	1 Lokal	Dinas Kesehatan
4	Bidang Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	Bengkel Otomotif Motor	Mengurangi Pengangguran	1 Paket	Dinas Tenaga Kerja
5	Bidang Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	Pengembangan atau Pelatihan Otomotif/Bengkel	Mengurangi Pengangguran	1 Paket	Dinas Tenaga Kerja
6	Bidang Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	Rehab Total Ruang Kelas Sdn Badak III	Meningkatan Ruang Kelas	2Kelas	Dinas Pendidikan
7	Bidang Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	Pembangunan Posyandu RW.06 Grand Sutera Desa Mekarsari	Meningkatkan Kesehatan Masyarakat	1 Unit	Dinas Kesehatan

8	Bidang Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	Pelatihan Siaga Bencana Kec.Pakuhaji	Peningkatan Kemampuan Relawan	1 Paket	BPBD
9	Bidang Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	Inovasi Kampung Tematik Batik	Inovasi Kecamatan	1 Paket	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
10	Bidang Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	Tambah Ruang Kelas (TRK) SDN Rancabango IV	Peningkatan Sarana Pendidikan	3 Ruang Kelas	Dinas Pendidikan
11	Bidang Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	Rehab Berat SDN Rancabango I	Peningkatan Sarana Pendidikan	3 Ruang Kelas	Dinas Pendidikan
12	Bidang Perekonomian Kerakyatan	Peternakan Telur Ayam	Meningkatkan Perekonomian Masyarakat	1.000 Ekor	Dinas Perikanan
13	Bidang Perekonomian Kerakyatan	Budidaya Ikan Nila dan Lele	Meningkatkan Perekonomian Masyarakat	1.000 Ekor	Dinas Perikanan
14	Bidang Perekonomian Kerakyatan	Budidaya Ayam Petelur	Meningkatkan Perekonomian Masyarakat	500 Ekor	Dinas Perikanan
15	Bidang Perekonomian Kerakyatan	Budidaya Ikan Lele	Meningkatkan Perekonomian Masyarakat	1000 Ekor	Dinas Perikanan
16	Bidang Perekonomian Kerakyatan	Pembinaan dan Pengelolaan Makanan Tradisonal	Mengurangi Pengangguran	1 Paket	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
17	Bidang Perekonomian Kerakyatan	Ternak Kambing	Meningkatkan Perekonomian Masyarakat	50 Ekor	Dinas Perikanan
18	Bidang Perekonomian Kerakyatan	Pelatihan Tata Boga	Meningkatkan Perekonomian Masyarakat	1 Paket	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
19	Bidang Perekonomian Kerakyatan	Pemberdayaan Pelatihan Jahit untuk keluarga kurang mampu	Meningkatkan Perekonomian Masyarakat	1 Paket	Dinas Tenaga Kerja
20	Bidang Perekonomian Kerakyatan	Pelatihan Las Untuk Keluarga Kurang Mampu	Meningkatkan Perekonomian Masyarakat	1 Paket	Dinas Tenaga Kerja
21	Bidang Infrastruktur	Pembangunan Gedung Serba Guna (GSG) Kecamatan Pakuhaji	Tersedianya Ruang Rapat	1Lokal	Dinas Tata Ruang dan Bangunan
22	Bidang Infrastruktur	U-ditch	Memperlancar Saluran Air	3x200m	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
23	Bidang Infrastruktur	BETONISASI	Peningkatan Jalan	2,5X300m	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
24	Bidang Infrastruktur	Betonisasi Lanjutan	Memperlancar Mobilisasi Masyarakat	3,5x1.000m	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
25	Bidang Infrastruktur	Lahan Parkir Masjid Al Barakah	Memperluas Lahan Parkir	200m2	Dinas Perkim
26	Bidang Infrastruktur	Pemagaran Pemakaman Umum	Mengamankan Aset Desa	150M	Dinas Perkim
27	Bidang Infrastruktur	Pembangunan Hotmix	Memperlancar Mobilisasi Masyarakat	2,5x227m	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
28	Bidang Infrastruktur	Pembangunan Jembatan	Memperlancar Mobilisasi Masyarakat	50x2,5m	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
29	Bidang Infrastruktur	Lanjutan Drainase	Memperlancar Saluran Air	200m	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
30	Bidang Infrastruktur	Pembangunan Betonisasi	Memperlancar Mobilisasi Masyarakat	200M	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
31	Bidang Infrastruktur	Pelebaran Jembatan Daon Sabrang Rt.001/004	Memperlancar Mobilisasi Masyarakat	1 Unit	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
32	Bidang Infrastruktur	Betonisasi	Memperlancar Mobilisasi Masyarakat	200m	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
33	Bidang Infrastruktur	Lanjutan Betonisasi Kp.Guha Caroge	Memperlancar Mobilisasi Masyarakat	400m	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air

34	Bidang Infrastruktur	Betonisasi	Memperlancar Mobilisasi Masyarakat	400m	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
35	Bidang Infrastruktur	Pembangunan Sarana Air Bersih (SAB)	Tersedianya Air Bersih	1 Unit	Dinas Perkim
36	Bidang Infrastruktur	Paving Block	Memperlancar Mobilisasi Masyarakat	100m2	Dinas Pendidikan
37	Bidang Infrastruktur	Spal	Memperlancar Saluran Air	300m	Dinas Perkim
38	Bidang Infrastruktur	Pembangunan Spal & Taman Puskesmas Pakuhaji	Peningkatan Sarana Kesehatan	500M	Dinas Kesehatan
39	Bidang Infrastruktur	Hotmix	Memperlancar Mobilisasi Masyarakat	2,5x400M	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
40	Bidang Infrastruktur	Betonisasi	Memperlancar Mobilisasi Masyarakat	4x300m	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
41	Bidang Infrastruktur	Hotmix	Memperlancar Mobilisasi Masyarakat	2x250m	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
42	Bidang Infrastruktur	Hotmix	Memperlancar Mobilisasi Masyarakat	2x250m	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
43	Bidang Infrastruktur	Betonisasi	Memperlancar Mobilisasi Masyarakat	5,5x350m	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
44	Bidang Infrastruktur	Betonisasi	Memperlancar Mobilisasi Masyarakat	3x250m	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
45	Bidang Infrastruktur	Turap	Memperlancar Saluran Air	2x300m	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
46	Bidang Infrastruktur	Betonisasi	Memperlancar Mobilisasi Masyarakat	4x150m	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
47	Bidang Infrastruktur	Betonisasi	Memperlancar Mobilisasi Masyarakat	4x150m	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
48	Bidang Infrastruktur	Pemagaran Belakang Kantor UPT PBB Wilayah III	Mengamankan Aset Kecamatan	300m	Dinas Tata Ruang dan Bangunan
49	Bidang Infrastruktur	Pembangunan Jalan Kp. Priuk Tegal RT.05/03 Desa Mekarsari	Memperlancar Mobilisasi Masyarakat	4x300m	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
50	Bidang Infrastruktur	Pemagaran Pemakaman Desa Umum	Mengamankan Aset Desa	300m	Dinas Perkim

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN PAKUHAJI

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Berbeda dengan periode 2025-2026, sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru yang menyebabkan adanya perbedaan pendekatan perumusan tujuan dan sasaran karena tidak tersedianya visi dan misi Kepala Daerah. Sehingga untuk tetap menjaga keselarasan dengan dokumen perencanaan yang masih berlaku dan menjaga kesinambungan pembangunan antar periode, maka Pemerintah Kabupaten Tangerang merumuskan tema Rencana Pembangunan Daerah 2025-2026 yang mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: 1. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2025; 2. Peraturan Gubernur Banten Nomor 33 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2023-2026. 3. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2005-2025

Untuk mewujudkan Visi tersebut di atas maka ditetapkan Misi Pemerintah Kabupaten Tangerang sebagai berikut :

1) Mewujudkan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Tangerang yang mandiri, berdaya saing tinggi dan berakhlak mulia;
2) Mewujudkan perekonomian daerah yang maju dan berdaya saing berbasis pada potensi keunggulan lokal;
3) Mewujudkan pelayanan dasar bagi masyarakat secara merata dan proporsional;
4) Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, demokratis dan partisipatif; dan
5) Mewujudkan pembangunan yang terpadu dan serasi dengan pendekatan.

Pengembangan wilayah berbasis ekonomi dan ekologi. Kecamatan Pakuhaji sebagai OPD pembantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan di bidang perhubungan. Dikaitkan dengan visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Tangerang dalam RPJPD 2005 – 2025 serta urusan pemerintahan yang diselenggarakan, maka fungsi dan tugas Kecamatan Pakuhaji terkait erat dengan pencapaian Misi keempat yaitu: “Mewujudkan tata Pemerintahan yang baik, demokratis dan Partisipatif”.

Pembangunan berkelanjutan dan Pemerataan infrastruktur Secara umum, pemerataan pembangunan antar daerah merupakan arahan untuk menyeimbangkan

pembangunan antar wilayah melalui upaya penyebaran kegiatan ekonomi. Infrastruktur dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat ke seluruh wilayah Kecamatan merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi karena secara langsung peningkatan infrastruktur yang menghubungkan antara pusat pertumbuhan ekonomi mampu mendorong kelancaran distribusi barang dan jasa, sehingga dapat mengurangi biaya produksi. Dengan demikian ketersediaan infrastruktur akan berpengaruh pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang menyelenggarakan fungsi-fungsi yaitu Penyusunan Rencana Strategis berdasarkan Rencana Strategis Pemerintah Daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Berdasarkan uraian, data dan penjelesan pada bab-bab sebelumnya, dengan mencermati permasalahan dan potensi yang ada dan dimiliki oleh Kecamatan Pakuhaji serta perspektif yang ingin dicapai, maka ditetapkan tujuan strategis untuk tahun 2025. Guna mencapai tujuan tersebut, ditetapkan pula sasaran strategis sebagaimana tercantum dalam dokumen Renstra (Rencana Strategis) Kecamatan Pakuhaji Tahun 2025-2026.

Selain dari uraian isu strategis pada bab sebelumnya, terdapat pula fokus peningkatan pelayanan publik Kecamatan Pakuhaji Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 4

Fokus 1	Meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja perangkat daerah;
Fokus 2	Memenuhi pelayanan publik sesuai dengan standar kecamatan.

Dari kedua fokus layanan tersebut, akan diuraikan secara lebih rinci lagi pada penyampaian data dan/atau informasi pada tabel berikut.

Tabel 5

No	Misi	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal	Target			Kondisi Akhir
					2023	2025	2025	2026	
1.	Mewujudkan Tata Pemerintahan yang baik, demokratis dan partisipatif	Meningkatkan Pelayanan Masyarakat	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	77,00	77,00	79,00	80,00	80,00
			Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Persen	100%	100%	100%	100%	100%
			Nilai AKIP	Nilai	63,45	71,00	71,50	72,00	72,00

3.3 **Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

Faktor-faktor yang menjadi bahan Pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan yaitu :

a. Pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Tangerang;
b. Pengentasan kemiskinan Ekstrim;
c. Pengentasan Stunting;
d. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah.

Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:

- Kecamatan Pakuhaji Pada Tahun 2025 memiliki 6 Program, 15 Kegiatan dan 31 Sub Kegiatan;
- Jumlah Pagu Indikatif Kecmatan Pakuhaji pada Tahun 2025 Sebesar Rp24.096.575.950,- yang berasal dari unsur kewilayahan.

Tabel 6.
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025
Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang Provinsi Banten.

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14
	KECAMATAN PAKUHAJI				**24.096.575.950,00**				
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**24.096.575.950,00**				
7.01	**KECAMATAN**				**24.096.575.950,00**				
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Kec. Pakuhaji**		**100 Persen**	**11.012.935.972**				
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun dibagi jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja dikali 100 persen Kinerja Perangkat Daerah"*		7 dokumen	284,180,000.00				
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								

		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Tangerang, Pakuhaji, Semua Kel/Desa	5 Dokumen	125.730.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Tangerang, Pakuhaji, Semua Kel/Desa	5 Laporan	50.580.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Tangerang, Pakuhaji, Semua Kel/Desa	2 Laporan	107.870.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah Kecamatan Pakuhaji*		100 %	6.966.738.563				
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Tangerang, Pakuhaji, Semua Kel/Desa	23 Orang/bulan	6.870.413.563	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			

7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD								
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Tangerang, Pakuhaji, Semua Kel/Desa	4 Laporan	96.325.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Kecamatan Pakuhaji/Dokumen*		1 dokumen	115.779.800				
7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD								
		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Tangerang, Pakuhaji, Semua Kel/Desa	4 Laporan	25.981.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Pegawai yang difasilitasi/Orang*		78 orang	629.507.300				
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya								
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Tangerang, Pakuhaji, Semua Kel/Desa	78 Paket	29,158,000.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			

7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi								
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Tangerang, Pakuhaji, Semua Kel/Desa	78 Orang	86,621,800.00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*	Kab. Tangerang, Pakuhaji, Semua Kel/Desa	78 Orang	**89,345,200.00**				
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah/Jenis*		11 dokumen	**639,213,300.00**				
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Tangerang, Pakuhaji, Semua Kel/Desa	5 Paket	**54,085,000.00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Tangerang, Pakuhaji, Semua Kel/Desa	15 Paket	**416,177,900.00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Tangerang, Pakuhaji, Semua Kel/Desa	50 Paket	**47,636,900.00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			

7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Tangerang, Pakuhaji, Semua Kel/Desa	5 Paket	**39,863,500.00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Tangerang, Pakuhaji, Semua Kel/Desa	5 Dokumen	**56,880,000.00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu								
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Tangerang, Pakuhaji, Semua Kel/Desa	12 Laporan	**24,570,000.00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Jasa Penunjang pada Kecamatan Pakuhaji/Jenis*		5 jenis	**1,969,774,068.00**				

7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Tangerang, Pakuhaji, Semua Kel/Desa	1 Laporan	**45,000,000.00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Tangerang, Pakuhaji, Semua Kel/Desa	5 Laporan	**314,344,500.00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Tangerang, Pakuhaji, Semua Kel/Desa	12 Laporan	**1,610,429,568.00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/Jenis*		5 Jenis	**947,905,041.00**				
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								

		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Tangerang, Pakuhaji, Semua Kel/Desa	5 Unit	**75,959,988.00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
7.01.01.2.09.0002	**Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan**	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*	Kab. Tangerang, Pakuhaji, Semua Kel/Desa	5 Unit	**203,748,128.00**				
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Tangerang, Pakuhaji, Semua Kel/Desa	10 Unit	**84,400,000.00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Tangerang, Pakuhaji, Semua Kel/Desa	4 Unit	**583,796,925.00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar**		**100 %**	**9,884,364,243.00**				
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar*		100 %	**118,835,000.00**				
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan								

		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	**118,835,000.00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	*Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara*		100 %	**14,869,600,239.00**				
7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum								
		Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kab. Tangerang, Pakuhaji, Semua Kel/Desa	35 Dokumen	**14,869,600,239.00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase pemenuhan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan**		**100 %**	**3,060,657,490.00**				
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa								

		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kab. Tangerang, Pakuhaji, Semua Kel/Desa	1 Lembaga Kemasyarakatan	86.940.900,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan								
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Tangerang, Pakuhaji, Semua Kel/Desa	5 Laporan	**24,195,000.00**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK DAERAH			
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan/pemberdayaan*		5 kelompok	21.776.600,00				
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat								
		Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kab. Tangerang, Pakuhaji, Semua Kel/Desa	1 Laporan	21.776.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum**		**100 %**	**98.124.100,00**				
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah kegiatan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan/Kali*		4 kali	98.124.100,00				

7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan								
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kab. Tangerang, Pakuhaji, Semua Kel/Desa	4 Laporan	53.868.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Prosentase Program Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum**		**100 %**	**302.814.080,00**				
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Jumlah Orang yang mengikuti pembinaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah/Orang*		65 orang	302.814.080,00				
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia								

		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kab. Tangerang, Pakuhaji, Semua Kel/Desa	100/3 Orang	29.300.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			

	KELURAHAN PAKUHAJI				**24.096.575.950,00**				
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**24.096.575.950,00**				
7.01	**KECAMATAN**				**24.096.575.950,00**				
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Kec. Pakuhaji**		**100 Persen**	**9.708.343.370,00**				
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah/Jenis*		11 dokumen	932.680.370,00				
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Tangerang, Pakuhaji, Sukatani	10 Paket	251.766.470,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Tangerang, Pakuhaji, Semua Kel/Desa	20 Paket	51.046.700,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Tangerang, Pakuhaji, Sukatani	5 Dokumen	3.888.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			

7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu								
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Tangerang, Pakuhaji, Sukatani	12 Laporan	26.640.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Jasa Penunjang pada Kecamatan Pakuhaji/Jenis*		5 jenis	1.683.918.700,00				
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Tangerang, Pakuhaji, Sukatani	2 Laporan	66.330.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Tangerang, Pakuhaji, Sukatani	12 Laporan	339.268.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/Jenis*		5 Jenis	1.180.370.980,00				
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								

		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Tangerang, Pakuhaji, Sukatani	5 Unit	11.550.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Tangerang, Pakuhaji, Sukatani	2 Unit	260.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara**		**100 %**	**9.212.217.200,00**				
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara*		100 %	92.217.200,00				
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan								
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Tangerang, Pakuhaji, Sukatani	1 Laporan	56.349.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase pemenuhan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan**		**100 %**	**4.697.056.900,00**				

7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan/pemberdayaan*		5 kelompok	3.531.904.300,00				
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan								
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kab. Tangerang, Pakuhaji, Sukatani	1 Lembaga Kemasyarakatan	370.451.300,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan								
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kab. Tangerang, Pakuhaji, Sukatani	20 Unit	2.665.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan								
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kab. Tangerang, Pakuhaji, Sukatani	5 Pokmas / Ormas	496.453.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum**		**100 %**	**98.124.100,00**				

7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah kegiatan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan/Kali*		4 kali	98.124.100,00				
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan								
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Laporan	44.256.100,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Rencana kerja Perubahan OPD Kecamatan Pakuhaji tersusun dalam program yang merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program tersebut, ditetapkan beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannyaTujuan.

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan kedalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran tujuan, visi dan misi organisasi. Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuntitatif maupun kualitatif. Untuk mengakomodir kebijakan yang disebabkan oleh adanya perubahan tugas pokok dan fungsi OPD Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang, diperlukan penyempurnaan maupun penyesuaian program dan kegiatan di dalam renstra OPD guna memenuhi kebutuhan tersebut.

Rencana Kerja merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu pemerintahan di Kabupaten Tangerang.

Adapun rumusan Indeks Kinerja Utama Tahun 2025-2026 adalah :

Tabel 7.
Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2025

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				DAERAH	
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18
		KECAMATAN PAKUHAJI				**15.324.823.496,00**	**25.203.238.105,00**	**25.128.049.387,00**	**9.803.225.891,00**				
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**15.324.823.496,00**	**25.203.238.105,00**	**25.128.049.387,00**	**9.803.225.891,00**				
	7.01	**KECAMATAN**				**15.324.823.496,00**	**25.203.238.105,00**	**25.128.049.387,00**	**9.803.225.891,00**				
1,	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Kec. Pakuhaji**	**100 Persen**	**100 Persen**	**8.239.169.461,00**	**9.481.778.273,00**	**9.708.343.370,00**	**-2.837.000.000,00**				
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun dibagi jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja dikali 100 persen Kinerja Perangkat Daerah"*	7 dokumen	7 dokumen	211.716.000,00	228.645.500,00	224.145.500,00	12.429.500,00			Meningkatkan Kualitas tata kelola pemerintahan Meningkatkan Kualitas tata kelola pemerintahan	Masyarakat Kecamatan Pakuhaji
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	81.132.500,00	52.027.500,00	50.527.500,00	-30.605.000,00	Kab. Tangerang, Pakuhaji, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas tata kelola pemerintahan Meningkatkan Kualitas tata kelola pemerintahan	
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											

			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	5 Laporan	62.691.900,00	63.881.900,00	62.381.900,00	-310.000,00	Kab. Tangerang, Pakuhaji, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas tata kelola pemerintahan Meningkatkan Kualitas tata kelola pemerintahan	
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan	67.891.600,00	112.736.100,00	111.236.100,00	43.344.500,00	Kab. Tangerang, Pakuhaji, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas tata kelola pemerintahan Meningkatkan Kualitas tata kelola pemerintahan	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah Kecamatan Pakuhaji*	100 %	100 %	5.429.678.861,00	5.442.717.523,00	5.427.311.220,00	-2.367.641,00			Meningkatkan Kualitas tata kelola pemerintahan Meningkatkan Kualitas tata kelola pemerintahan	Masyarakat Kecamatan Pakuhaji
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23 Orang/bulan	23 Orang/bulan	5.402.169.461,00	5.430.505.923,00	5.416.599.620,00	14.430.159,00	Kab. Tangerang, Pakuhaji, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Kualitas tata kelola pemerintahan Meningkatkan Kualitas tata kelola pemerintahan	
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD											
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	4 Laporan	27.509.400,00	12.211.600,00	10.711.600,00	-16.797.800,00	Kab. Tangerang, Pakuhaji, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas tata kelola pemerintahan Meningkatkan Kualitas tata kelola pemerintahan	
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Kecamatan Pakuhaji/Dokumen*	1 dokumen	1 dokumen	24.992.400,00	25.481.400,00	25.981.400,00	989.000,00			Meningkatkan Kualitas tata kelola pemerintahan Meningkatkan Kualitas tata kelola pemerintaha	Masyarakat Kecamatan Pakuhaji

												n	
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD											
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	4 Laporan	24.992.400,00	25.481.400,00	25.981.400,00	989.000,00	Kab. Tangerang, Pakuhaji, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas tata kelola pemerintahan Meningkatkan Kualitas tata kelola pemerintahan	
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Pegawai yang difasilitasi/Orang*	78 orang	78 orang	169.624.600,00	233.935.200,00	233.935.200,00	64.310.600,00			Meningkatkan Kualitas tata kelola pemerintahan Meningkatkan Kualitas tata kelola pemerintahan	Masyarakat Kecamatan Pakuhaji
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya											
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	78 Paket	78 Paket	50.000.000,00	112.166.600,00	112.166.600,00	62.166.600,00	Kab. Tangerang, Pakuhaji, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas tata kelola pemerintahan Meningkatkan Kualitas tata kelola pemerintahan	
	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi											
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	78 Orang	78 Orang	119.624.600,00	121.768.600,00	121.768.600,00	2.144.000,00	Kab. Tangerang, Pakuhaji, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas tata kelola pemerintahan Meningkatkan Kualitas tata kelola pemerintahan	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah/Jenis*	11 dokumen	11 dokumen	546.255.300,00	924.318.370,00	932.680.370,00	386.425.070,00			Meningkatkan Kualitas tata kelola pemerintahan Meningkatkan Kualitas tata kelola pemerintahan	Masyarakat Kecamatan Pakuhaji
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											

			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	19.230.000,00	19.230.000,00	19.230.000,00	0,00	Kab. Tangerang, Pakuhaji, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas tata kelola pemerintahan Meningkatkan Kualitas tata kelola pemerintahan	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	15 Paket	150.000.000,00	240.479.900,00	240.479.900,00	90.479.900,00	Kab. Tangerang, Pakuhaji, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas tata kelola pemerintahan Meningkatkan Kualitas tata kelola pemerintahan	
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor											
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	50 Paket	50 Paket	59.967.300,00	59.967.300,00	72.667.300,00	12.700.000,00	Kab. Tangerang, Pakuhaji, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas tata kelola pemerintahan Meningkatkan Kualitas tata kelola pemerintahan	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan											
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	53.758.000,00	53.758.000,00	54.154.000,00	396.000,00	Kab. Tangerang, Pakuhaji, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas tata kelola pemerintahan Meningkatkan Kualitas tata kelola pemerintahan	
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan											
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	5 Dokumen	9.600.000,00	25.368.000,00	19.368.000,00	9.768.000,00	Kab. Tangerang, Pakuhaji, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas tata kelola pemerintahan Meningkatkan Kualitas tata kelola pemerintahan	
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu											
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	26.280.000,00	84.720.000,00	84.720.000,00	58.440.000,00	Kab. Tangerang, Pakuhaji, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas tata kelola pemerintahan Meningkatkan Kualitas tata kelola pemerintahan	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											

			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	4 Laporan	93.920.000,00	108.720.000,00	108.720.000,00	14.800.000,00	Kab. Tangerang, Pakuhaji, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas tata kelola pemerintahan Meningkatkan Kualitas tata kelola pemerintahan	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Jasa Penunjang pada Kecamatan Pakuhaji/Jenis*	5 jenis	5 jenis	906.145.600,00	1.556.859.300,00	1.683.918.700,00	777.773.100,00			Meningkatkan Kualitas tata kelola pemerintahan Meningkatkan Kualitas tata kelola pemerintahan	Masyarakat Kecamatan Pakuhaji
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat											
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	2.187.600,00	2.187.600,00	-12.812.400,00	Kab. Tangerang, Pakuhaji, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas tata kelola pemerintahan Meningkatkan Kualitas tata kelola pemerintahan	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 Laporan	5 Laporan	135.717.600,00	182.995.200,00	196.004.600,00	60.287.000,00	Kab. Tangerang, Pakuhaji, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas tata kelola pemerintahan Meningkatkan Kualitas tata kelola pemerintahan	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	463.128.000,00	994.128.000,00	1.080.128.000,00	617.000.000,00	Kab. Tangerang, Pakuhaji, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas tata kelola pemerintahan Meningkatkan Kualitas tata kelola pemerintahan	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/Jenis*	5 Jenis	5 Jenis	950.756.700,00	1.069.820.980,00	1.180.370.980,00	229.614.280,00			Meningkatkan Kualitas tata kelola pemerintahan Meningkatkan Kualitas tata kelola pemerintahan	Masyarakat Kecamatan Pakuhaji
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											

			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	5 Unit	334.995.000,00	291.240.980,00	301.790.980,00	-33.204.020,00	Kab. Tangerang, Pakuhaji, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas tata kelola pemerintahan Meningkatkan Kualitas tata kelola pemerintahan	
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit	41.150.000,00	39.930.000,00	39.930.000,00	-1.220.000,00	Kab. Tangerang, Pakuhaji, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas tata kelola pemerintahan Meningkatkan Kualitas tata kelola pemerintahan	
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	4 Unit	354.411.700,00	467.100.000,00	567.100.000,00	212.688.300,00	Kab. Tangerang, Pakuhaji, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas tata kelola pemerintahan Meningkatkan Kualitas tata kelola pemerintahan	
2,	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar**	**100 %**	**100 %**	**2.274.000.000,00**	**8.839.702.200,00**	**9.212.217.200,00**	**-2.274.000.000,00**				
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar*	100 %	100 %	274.000.000,00	99.702.200,00	92.217.200,00	-181.782.800,00			Meningkatkan Kualitas tata kelola pemerintahan Meningkatkan Kualitas tata kelola pemerintahan	Masyarakat Kecamatan Pakuhaji
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan											
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	200.000.000,00	42.852.600,00	35.867.600,00	-164.132.400,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas tata kelola pemerintahan Meningkatkan Kualitas tata kelola pemerintahan	
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	*Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara*	100 %	100 %	2.000.000.000,00	8.740.000.000,00	9.120.000.000,00	7.120.000.000,00			Meningkatkan Kualitas tata kelola pemerintahan Meningkatkan Kualitas tata kelola pemerintahan	Masyarakat Kecamatan Pakuhaji
	7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum											

			Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	35 Dokumen	35 Dokumen	2.000.000.000,00	8.740.000.000,00	9.120.000.000,00	7.120.000.000,00	Kab. Tangerang, Pakuhaji, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas tata kelola pemerintahan Meningkatkan Kualitas tata kelola pemerintahan	
3,	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase pemenuhan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan**	**100 %**	**100 %**	**2.637.600.000,00**	**4.694.998.900,00**	**4.697.056.900,00**	**-2.637.600.000,00**				
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan/pemberdayaan*	5 kelompok	5 kelompok	1.165.000.000,00	1.048.356.000,00	1.143.376.000,00	-21.624.000,00			Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Meningkatkan Perekonomian Masyarakat	Masyarakat Kecamatan Pakuhaji
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa											
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	85.000.000,00	87.940.900,00	86.940.900,00	1.940.900,00	Kab. Tangerang, Pakuhaji, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Meningkatkan Perekonomian Masyarakat	
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan											
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5 Laporan	5 Laporan	1.080.000.000,00	960.415.100,00	1.056.435.100,00	-23.564.900,00	Kab. Tangerang, Pakuhaji, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK DAERAH	Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Meningkatkan Perekonomian Masyarakat	
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan/pemberdayaan*	5 kelompok	5 kelompok	50.000.000,00	21.776.600,00	21.776.600,00	-28.223.400,00			Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Meningkatkan Perekonomian Masyarakat	Masyarakat Kecamatan Pakuhaji
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat											
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	21.776.600,00	21.776.600,00	-28.223.400,00	Kab. Tangerang, Pakuhaji, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Meningkatkan Perekonomian Masyarakat	

4,	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum**	**100 %**	**100 %**	**125.000.000,00**	**102.682.100,00**	**98.124.100,00**	**-125.000.000,00**				
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah kegiatan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan/Kali*	4 kali	4 kali	125.000.000,00	102.682.100,00	98.124.100,00	-26.875.900,00			Meningkatkan Kualitas tata kelola pemerintahan Meningkatkan Kualitas tata kelola pemerintahan	Masyarakat Kecamatan Pakuhaji
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan											
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	4 Laporan	75.000.000,00	50.572.000,00	53.868.000,00	-21.132.000,00	Kab. Tangerang, Pakuhaji, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas tata kelola pemerintahan Meningkatkan Kualitas tata kelola pemerintahan	
5,	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Prosentase Program Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum**	**100 %**	**100 %**	**180.000.000,00**	**130.300.480,00**	**302.814.080,00**	**-180.000.000,00**				
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Jumlah Orang yang mengikuti pembinaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah/Orang*	65 orang	65 orang	180.000.000,00	130.300.480,00	302.814.080,00	122.814.080,00			Meningkatkan Kualitas tata kelola pemerintahan Meningkatkan Kualitas tata kelola pemerintahan	Masyarakat Kecamatan Pakuhaji
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia											

			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100/3 Orang	100/3 Orang	80.000.000,00	30.300.600,00	29.300.600,00	-50.699.400,00	Kab. Tangerang, Pakuhaji, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas tata kelola pemerintahan Meningkatkan Kualitas tata kelola pemerintahan	
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan											
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 Dokumen	4 Dokumen	100.000.000,00	99.999.880,00	273.513.480,00	173.513.480,00	Kab. Tangerang, Pakuhaji, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas tata kelola pemerintahan Meningkatkan Kualitas tata kelola pemerintahan	
6,	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase tertib administrasi pemerintahan desa**	**100 %**	**100 %**	**50.000.000,00**	**87.020.300,00**	**78.020.300,00**	**-50.000.000,00**				
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Tersedianya Laporan Keuangan Desa Sesuai Standar dan Jumlah Desa yang di Fasilitasi*	12 laporan	12 laporan	50.000.000,00	87.020.300,00	78.020.300,00	28.020.300,00			Meningkatkan Kualitas tata kelola pemerintahan Meningkatkan Kualitas tata kelola pemerintahan	Masyarakat Kecamatan Pakuhaji
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa											
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 Dokumen	12 Dokumen	50.000.000,00	87.020.300,00	78.020.300,00	28.020.300,00	Kab. Tangerang, Pakuhaji, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas tata kelola pemerintahan Meningkatkan Kualitas tata kelola pemerintahan	
		KELURAHAN PAKUHAJI				**13.505.769.461,00**	**23.336.482.253,00**	**24.096.575.950,00**	**10.590.806.489,00**				
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**13.505.769.461,00**	**23.336.482.253,00**	**24.096.575.950,00**	**10.590.806.489,00**				
	7.01	**KECAMATAN**				**13.505.769.461,00**	**23.336.482.253,00**	**24.096.575.950,00**	**10.590.806.489,00**				

1,	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Kec. Pakuhaji**	**100 Persen**	**100 Persen**	**8.239.169.461,00**	**9.481.778.273,00**	**9.708.343.370,00**	**-2.837.000.000,00**				
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah/Jenis*	11 dokumen	11 dokumen	546.255.300,00	924.318.370,00	932.680.370,00	386.425.070,00			Meningkatkan Kualitas tata kelola pemerintahan Meningkatkan Kualitas tata kelola pemerintahan	Masyarakat Kelurahan Pakuhaji
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	50.000.000,00	243.912.470,00	251.766.470,00	201.766.470,00	Kab. Tangerang, Pakuhaji, Sukatani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas tata kelola pemerintahan Meningkatkan Kualitas tata kelola pemerintahan	
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor											
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 Paket	20 Paket	52.420.000,00	57.634.700,00	51.046.700,00	-1.373.300,00	Kab. Tangerang, Pakuhaji, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas tata kelola pemerintahan Meningkatkan Kualitas tata kelola pemerintahan	
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan											
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	5 Dokumen	4.800.000,00	3.888.000,00	3.888.000,00	-912.000,00	Kab. Tangerang, Pakuhaji, Sukatani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas tata kelola pemerintahan Meningkatkan Kualitas tata kelola pemerintahan	
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu											
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	26.280.000,00	26.640.000,00	26.640.000,00	360.000,00	Kab. Tangerang, Pakuhaji, Sukatani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas tata kelola pemerintahan Meningkatkan Kualitas tata kelola pemerintahan	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Jasa Penunjang pada Kecamatan Pakuhaji/Jenis*	5 jenis	5 jenis	906.145.600,00	1.556.859.300,00	1.683.918.700,00	777.773.100,00			Meningkatkan Kualitas tata kelola pemerintahan Meningkatkan Kualitas tata kelola pemerintahan	Masyarakat Kelurahan Pakuhaji

												n	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	2 Laporan	35.000.000,00	66.280.500,00	66.330.500,00	31.330.500,00	Kab. Tangerang, Pakuhaji, Sukatani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas tata kelola pemerintahan Meningkatkan Kualitas tata kelola pemerintahan	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	257.300.000,00	311.268.000,00	339.268.000,00	81.968.000,00	Kab. Tangerang, Pakuhaji, Sukatani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas tata kelola pemerintahan Meningkatkan Kualitas tata kelola pemerintahan	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/Jenis*	5 Jenis	5 Jenis	950.756.700,00	1.069.820.980,00	1.180.370.980,00	229.614.280,00			Meningkatkan Kualitas tata kelola pemerintahan Meningkatkan Kualitas tata kelola pemerintahan	Masyarakat Kelurahan Pakuhaji
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	5 Unit	20.200.000,00	11.550.000,00	11.550.000,00	-8.650.000,00	Kab. Tangerang, Pakuhaji, Sukatani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas tata kelola pemerintahan Meningkatkan Kualitas tata kelola pemerintahan	
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	200.000.000,00	260.000.000,00	260.000.000,00	60.000.000,00	Kab. Tangerang, Pakuhaji, Sukatani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas tata kelola pemerintahan Meningkatkan Kualitas tata kelola pemerintahan	
2,	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara**	**100 %**	**100 %**	**2.274.000.000,00**	**8.839.702.200,00**	**9.212.217.200,00**	**-2.274.000.000,00**				

	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara*	100 %	100 %	274.000.000,00	99.702.200,00	92.217.200,00	-181.782.800,00			Meningkatkan Kualitas tata kelola pemerintahan Meningkatkan Kualitas tata kelola pemerintahan	Masyarakat Kelurahan Sukatani
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan											
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	74.000.000,00	56.849.600,00	56.349.600,00	-17.650.400,00	Kab. Tangerang, Pakuhaji, Sukatani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas tata kelola pemerintahan Meningkatkan Kualitas tata kelola pemerintahan	
3,	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase pemenuhan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan**	**100 %**	**100 %**	**2.637.600.000,00**	**4.694.998.900,00**	**4.697.056.900,00**	**-2.637.600.000,00**				
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan/pemberdayaan*	5 kelompok	5 kelompok	1.422.600.000,00	3.624.866.300,00	3.531.904.300,00	2.109.304.300,00			Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Meningkatkan Perekonomian Masyarakat	Masyarakat Kelurahan Pakuhaji
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan											
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	370.800.000,00	370.951.300,00	370.451.300,00	-348.700,00	Kab. Tangerang, Pakuhaji, Sukatani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Meningkatkan Perekonomian Masyarakat	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan											
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	20 Unit	20 Unit	450.000.000,00	2.765.000.000,00	2.665.000.000,00	2.215.000.000,00	Kab. Tangerang, Pakuhaji, Sukatani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Meningkatkan Perekonomian Masyarakat	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan											
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	601.800.000,00	488.915.000,00	496.453.000,00	-105.347.000,00	Kab. Tangerang, Pakuhaji, Sukatani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Meningkatkan Perekonomian Masyarakat	

4,	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum**	**100 %**	**100 %**	**125.000.000,00**	**102.682.100,00**	**98.124.100,00**	**-125.000.000,00**				
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah kegiatan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan/Kali*	4 kali	4 kali	125.000.000,00	102.682.100,00	98.124.100,00	-26.875.900,00			Meningkatkan Kualitas tata kelola pemerintahan Meningkatkan Kualitas tata kelola pemerintahan	Masyarakat Kelurahan Pakuhaji
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan											
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	4 Laporan	50.000.000,00	52.110.100,00	44.256.100,00	-5.743.900,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas tata kelola pemerintahan Meningkatkan Kualitas tata kelola pemerintahan	
	JUMLAH					**13.505.769.461,00**	**23.336.482.253,00**	**24.096.575.950,00**	**1.524.954.139.612,00**				

BAB V
PENUTUP

Dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, maka diharapkan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang Tahun 2025 dapat digunakan sebagai pedoman kerja bagi aparatur Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang sesuai dengan Visi dan Misi yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.

Pencapaian target kinerja yang belum sesuai dikarenakan oleh beberapa faktor penyebab, oleh karena itu untuk tahun berikutnya diharapkan bagi setiap Perangkat Daerah sebagai Tim Penyusun Renja dan Bappeda sebagai Tim Verifikator agar bisa mengatasi hambatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta dapat menyelaraskan program dan kegiatan yang sudah direncanakan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dan disepakati.

Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2025, Rencana Kerja (Renja) juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang. Rencana Kerja (Renja) juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para Pimpinan dan seluruh staf Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang Tahun 2025 adalah Dokumen Perencanaan Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2025 Baik Sebelum Maupun Setelah Perubahan, Renja ini diharapkan mampu menjadi acuan dan pedoman Penyelenggaraan Program dan Kegiatan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang pada Tahun 2025 agar sesuai dengan Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan yang ditetapkan.

Dengan adanya Renja Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan.

Dalam penyusunan Rencana Kerja ini diharapkan kedepan nanti fungsi pengawasan dan pengendalian dalam proses penyesunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dapat tercapai, terpenuhinya kinerja pegawai dalam melaksanakan tugas dan kegiatan yang sudah direncanakan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan, terpenuhinya pencapaian keselarasan antara program dan kegiatan, serta optimalisasi pencapaian sasaran pelaksanaan dan pendanaan program dan kegiatan.

Melalui Rencana Kerja (Renja) ini diharapkan agar setiap aparatur yang mendukungnya, mampu melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala guna meningkatkan capaian kinerja yang lebih baik melalui upaya memahami tugas dan meningkatkan pelaksanaannya dengan penuh tanggungjawab dan kerja keras. Akhir kata, Semoga Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2025 ini dapat bermanfaat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

47. Kecamatan Kosambi

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Kecamatan kosambi merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah atau Kecamatan di Kabupaten Tangerang yang merupakan pemekaran dari kecamatan Teluknaga dan pembentukannya pertama kali diterapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1992 dan diresmikan oleh Gubernur Jawa Barat di Kabupaten Indramayu pada tanggal 28 September 1992 yang kemudian beberapa kali dilakukan/ditetapkan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Kedudukan susunan organisasi, tugas dan fungsi Pemerintah Kecamatan Kosambi dengan berlakunya Otonomi Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 telah merubah fungsi Kecamatan sebagai Perangkat Wilayah dalam Asas Dekonsentrasi menjadi perangkat daerah dalam Asas Desentralisasi.

Sebagai Perangkat Daerah, Camat dalam menjalankan Tugasnya mendapat Pelimpahan sebagian Kewenangan dari Bupati untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Kecamatan memiliki peran yang penting dalam Menunjang Keberhasilan Pemerintah Daerah Otonom karena merupakan ujung Tombak Pelayanan dan Pembinaan Masyarakat. Pembangunan baik ditingkat Lokal, Regional maupun secara Nasional, dari tingkat Administrasi yang paling kecil (Kelurahan/Desa), Kecamatan, Kabupaten dan Kota, Provinsi dan Negara. Tanggung jawab sesuai dengan lingkup tugas yang diemban itulah yang disebut sebagai suatu komitmen. Komitmen-komitmen inilah yang terdapat di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Rencana Kerja Perubahan (RENJA-P) Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Tahunan pada level Satuan Kerja Perangkat Daerah dan disusun sebagai Penjabaran Rencana Strategis (Renstra) yang berisi informasi tentang rencana program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh SKPD dalam satu tahun anggaran yang dilengkapi kerangka anggaran dan kerangka regulasi serta memberikan gambaran mengenai tujuan, sasaran dan target kinerja dan bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan SKPD sesuai tupoksinya.

1.2 LANDASAN HUKUM

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
4. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembangunan Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Propinsi Banten
11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintahan, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 tahun 2009 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2005 - 2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang Tahun 2011-2031
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor.08 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang.
20. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 113 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kerja (P) Kecamatan Kosambi Tahun 2025 disusun dengan maksud untuk memberikan arah Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kehidupan Kemasyarakatan. Kegiatan-Kegiatan satu Tahun kedepan yang tertuang dalam Rencana Kerja Kecamatan Kosambi merupakan Implementasi dari Rencana Strategis Pemerintah Kecamatan Kosambi maupun semua lapisan masyarakat sehingga, Pelaksanaan Pembangunan, kemasyarakatan dan hasil-hasil Pelayanan Publik dapat menciptakan kondisi yang kondusif dan mendapatkan Pengakuan dari Elemen Masyarakat. Tujuan Penyusunan Rencana Kerja (P) Kecamatan Kosambi Tahun 2025 :

1. Untuk Memberikan arahan dan pedoman bagi Kecamatan Kosambi dalam melaksanakan program dan kegiatan satu tahun kedepan

2. Sebagai input dalam Rangka Perbaikan Pelaksanaan tugas dan Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan, kemasyarakatan dan Pembangunan satu tahun kedepan;
3. Membuat Acuan Perencanaan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD Kecamatan;
4. Sebagai bahan Evaluasi Perencanaan tugas-tugas Pemerintahan Kecamatan berikutnya.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Dokumen Rencana Kerja Kecamatan Kosambi diformulasikan dalam Sistematika Penulisan sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan
Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat
dipahami dengan baik. Bab ini berisi Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penulisan.

BAB II. EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

Evaluasi RENJA Sampai dengan Triwulan I dan Capaian Kinerja Pada Perangkat Dearah dan Capaian Kinerja Perangkat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1 Evaluasi RENJA Sampai dengan Triwulan I dan Capaian Kinerja Pada Perangkat Dearah.

Berdasarkan hasil Evaluasi Kegiatan Tahun Anggaran 2025, Kecamatan Kosambi telah berupaya melakukan semua Kegiatan yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025. Adapun Pelaksanaan Program kerja Tahun 2025 Kecamatan Kosambi berdasarkan klasifikasi Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan adalah sebagai berikut :

7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA**
7.01.01.2.01	**PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASIKINERJA PERANGKAT DAERAH**
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan PerangkatDaerah
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
7.01.01.2.02	**ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH**
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD
7.01.01.2.03	**ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADAPERANGKAT DAERAH**
7.01.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
7.01.01.2.05	**ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH**
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta AtributKelengkapannya
7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
7.01.01.2.06	**ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH**
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
7.01.01.2.08	**PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7.01.01.2.09	**PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**
7.01.02.2.02	**PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN**
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
7.01.02.2.03	**KOORDINASI PEMELIHARAAN PRASARANA DAN SARANA PELAYANAN UMUM**
7.01.02.2.03.0001	Koordinasi / Sinergi dengan Perangkat Daerah dan / atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**
7.01.03.2.01	**KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA**
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
7.01.03.2.02	**KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN**
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
7.01.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan
7.01.03.2.06	**PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA TINGKAT KECAMATAN DAN KELURAHAN**
7.01.03.2.06.07	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**
7.01.04.2.01	**KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**
7.01.06.2.01	**FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
7.01.06.2.01.16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja s/d Triwulan I Tahun 2025 Capai Kinerja Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang

Kecamatan Kosambi

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran RAK **Triwulan 1 Tahun 2025**	Penyerapan **2025 di Triwulan 1**	Capaian per Triwulan 1 (%)
Sasaran : Terpenuhinya pelayanan publik sesuai dengan standar kecamatan				
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLI**K			
7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**			
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	8.516.000,00	7.300.000,00	85,72
7.01.02.2.03	**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**			
7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	2.235.000,00	2.235.000,00	100,00
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**			
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	54.399.000,00	54.399.000,00	100,00
7.01.03.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	412.276.000,00	323.210.000,00	78,40
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**			
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	53.997.000,00	0,00	0,00

7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	857.177.730,00	838.572.000,00	97,83
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	380.777.500,00	94.500.000,00	24,82
7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan	13.236.000,00	0,00	0,00
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			
7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**			
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	156.341.000,00	0,00	0,00
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**			
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**			
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara	14.184.000,00	0,00	0,00
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	5.783.000,00	0,00	0,00
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**			
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	2.279.000,00	0,00	0,00
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	3.106.000,00	3.106.000,00	100,00
7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	22.069.000,00	0,00	0,00

Sasaran : Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja				
X.XX.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			
X.XX.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			
X.XX.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00
X.XX.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		0,00	0,00
X.XX.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0,00	0,00
X.XX.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			
X.XX.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.079.533.345,00	2.773.775.040,00	90,07
X.XX.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0,00	0,00	0,00
X.XX.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	7.709.000,00	0,00	0,00
X.XX.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**			
X.XX.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	0,00	0,00	0,00
X.XX.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**			
X.XX.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	0,00	0,00	0,00
X.XX.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00
X.XX.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			
X.XX.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0,00	0,00	0,00
X.XX.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	0,00
X.XX.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	18.368.500,00	0,00	0,00

X.XX.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	50.000.700,00	0,00	0,00
X.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	37.472.500,00	0,00	0,00
X.XX.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	53.802.000,00	34.650.000,00	64,40
X.XX.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.400.000,00	0,00	0,00
X.XX.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			
X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	52.342.887,00	24.647.771,00	47,09
X.XX.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	818.488.392,00	517.750.000,00	63,26
X.XX.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			
X.XX.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	16.674.996,00	16.674.996,00	100,00
X.XX.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	65.256.240,00	59.419.992,00	91,06
X.XX.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00
X.XX.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00
TOTAL		6.214.819.790,00	4.765.239.799,00	76,68

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD

Dalam Rangka Meningkatkan Kinerja Aparatur Kecamatan Kosambi menuju Pelaksanaan Tata Pemerintahan yang baik serta untuk Meningkatkan Pelayanan kepada Masyarakat Khususnya Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat perlu adanya Standar Pelayanan Minimal. Standar Pelayanan Minimal merupakan Tolok Ukur bagi Aparatur dalam memberikan Pelayanan kepada Masyarakat.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Kecamatan Kosambi
Kabupaten Tangerang

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD			Realisasi Capaian		
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
1	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	-	-	91.50	93.00	94.50	86,62	-	-
2	Nilai AKIP	-	-	80.45	81.50	82.25	83.65	-	-

Dari Tabel 2.2 dapat dilihat Pencapaian Kinerja Pelayananan SKPD Kecamatan Kosambi dari target di Renstra SKPD dengan realisasi capaian dari Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026. Adapun beberapa hal yang perlu dilakukan untuk keberhasilan pelaksanaan dalam meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat, antara lain :

1. Mengoptimalkan kinerja pegawai agar berkualitas sesuai dengan Keahliannya;
2. Mengadakan Pendidikan dan Pelatihan sesuai dengan bidang tugasnya;
3. Meningkatkan Sistem Pelayanan Masyarakat yang Efektif dan Efisien;
4. Meningkatkan Sistem Informasi Manajemen yang handal;
5. Mengoptimalkan Aparatur yang Professional yang didukung oleh Sistem Pengembangan Karier yang berbasis Kompetensi dan Presetasi.

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD

Berdasarkan Identifikasi Permasalahan dan Telahan dari beberapa Dokumen Perencanaan lainnya, maka isu-isu Strategis yang ada di Bidang Pelayanan Publik, Kesehatan, Pendidikan, Ekonomi dan Infrastruktur.

2.3.1 Bidang Pelayanan Publik,

Permasalahan antara lain :

1. Belum memadainya Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik;
2. Masih Kurangnya SDM yang Kompeten di Bidang Pelayanan Publik.

Dampak yang terkait :

Masyarakat belum Bisa Merasakan Sarana dan Prasarana Palayanan Publik

Solusinya :

Respon Cepat Terhadap Keluhan Masyarakat

2.3.2 Bidang Kesehatan,

Permasalahan antara lain :

1. Masih Rendahnya Tingkat Pengetahuan Tentang Kesehatan dan Pola Hidup Sehat (PHBS);

Dampak yang terkait :

1. Terjangkit Penyakit dan Kurangnya Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)

Solusinya :

1. menjaga kebersihan dan kesehatan diri, keluarga, dan lingkungan sekitar

2.3.3 Bidang Pendidikan

Permasalahan antara lain

1. Kurang memadai sarana dan prasarana Pendidikan formal, Khususnya Sekolah Dasar (SD).

Dampak yang terkait :

1. dapat menghasilkan tingkat pengangguran di masa depan tinggi,

Solusinya

1. Harus memadai sarana dan prasarana Pendidikan formal dan non Formal

2.3.4 Bidang Ekonomi

Permasalahan, antara lain :

1. Masih kurangnya Kegiatan Usaha Produktif;
2. Kurang Optimalnya Kelompok Usaha untuk Memecahkan Usaha bersama;
3. Belum adanya jaringan Kerjasama untuk Mengembangkan Usaha;
4. Lemahnya Penguasaan Teknologi Dalam Masyarakat Bawah

Dampak yang Terkait

Banyak Persaingan dalam Usaha/Perdagangan Dan Minimnya Pekerjaan

Solusinya :

Membuka Lowongan Kerja untuk Masyarakat di Lingkungan Sekitar

2.3.5. Bidang Infrastruktur

Permasalahan, antara lain :

1. Drainase dan Saluran air yang ada Kurang berfungsi dan perlu perbaikan;
2. Belum ada Sistem Saluran Drainase Terpadu yang menyeluruh;
3. Belum adanya Pelayanan Air Bersih dari PDAM;
4. Belum adanya sistem Pengolahan Sampah Terpadu;
5. Kurangnya Armada Pengangkut Sampah (Dumptruck)
6. Masih ada Jalan yang belum dilengkapi dengan Saluran Airnya sehingga terjadi luapan air di ruas Jalan pada saat Hujan.

Dampak yang Terkait

1. Sering Terjadi Banjir/Air Rob di Masyarakat
2. Penumpukan Sampah di Jalan Umum dan Masyarakat
3. Terjadi Kecelakaan Ketika Jalan Berlubang

Soluisnya :

1. Masyarakat Menjaga Kebersihan Lingkungannya Dalam Bergotong-royong
2. Memberi Tanda Peringatan, Ketika Jalan Berlubang

Kecamatan Kosambi, merupakan unsur Pelaksana Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan, dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan Kosambi mempunyai tugas Melaksanakan Kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan Bupati dan tugas Pemerintahan lainnya. Tugas dan fungsi serta tata kerja Kecamatan Kosambi, mengacu pada Peraturan Bupati Tangerang Nomor 113 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang.

Dalam Menyelenggarakan Tugas Pokok Kecamatan Kosambi mempunyai tugas :

a. Menyelenggarakan urusan Pemerintahan Umum;
b. Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat;
c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
d. Mengkoordinasikan Penerapan dan Penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
e. Mengkoordinasikan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan umum;
f. Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
g. Membina dan Mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan Kelurahan;
h. Melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan;
i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Rencana kerja bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan apabila ditunjang dengan dokumen perencanaan yang baik, dalam rangka mengawal programdan kegiatan pembangunan agar dapat berjalan secara efektif dan efisien serta tepat sasaran. Dokumen perencanaan berawal dari RKPD Kabupaten Tangerang, Rencana Strategis Kecamatan dan Rencana Kerja Kecamatan.

Rencana kerja Kecamatan tahun 2025 sesuai dengan Renstra Kecamatan Kosambi tahun 2025 -2026, rencana kerja ini agar mewujudkan konsistensi dokumen perencanaan Kecamatan.

Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	Kecamatan Kosambi				16.118.751.477,00	Kecamatan Kosambi				16.118.751.477,00	
	UNSUR KEWILAYAHAN				16.118.751.477,00	UNSUR KEWILAYAHAN				16.118.751.477,00	
	KECAMATAN				16.118.751.477,00	KECAMATAN				16.118.751.477,00	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		-	-	13.314.232.742,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		-	-	13.314.232.742,00	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		-	-	105.000.000,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		-	-	105.000.000,00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	35.000.000,00			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	35.000.000,00	

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	35.000.000,00			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	35.000.000,00	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	35.000.000,00			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	35.000.000,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		-	-	10.528.751.477,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		-	-	10.528.751.477,00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55 Orang/bulan	10.468.751.477,00			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55 Orang/bulan	10.468.751.477,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	25.000.000,00			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	25.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD					
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	35.000.000,00			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	35.000.000,00	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		-	-	25.000.000,00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		-	-	25.000.000,00	

	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD					Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD					
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	25.000.000,00			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	25.000.000,00	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		-	-	145.000.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		-	-	145.000.000,00	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya					Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya					
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	45.000.000,00			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	45.000.000,00	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	55 Orang	100.000.000,00			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	55 Orang	100.000.000,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		-	-	535.000.000,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah		-	-	535.000.000,00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor					
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	15.000.000,00			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	15.000.000,00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	150.000.000,00			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	150.000.000,00	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	50.000.000,00			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	50.000.000,00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					Penyediaan Bahan Logistik Kantor					
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	50.000.000,00			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	50.000.000,00	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					

			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	50.000.000,00			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	50.000.000,00	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu					Fasilitasi Kunjungan Tamu					
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	160.000.000,00			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	160.000.000,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	60.000.000,00			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	60.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	-	1.417.000.000,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	-	1.417.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	120.000.000,00			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	120.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.297.000.000,00			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.297.000.000,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	-	558.481.265,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	-	558.481.265,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit	85.000.000,00			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit	85.000.000,00	

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit	263.481.265,00			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit	263.481.265,00	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	60.000.000,00			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	60.000.000,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	150.000.000,00			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	150.000.000,00	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		-	-	750.018.735,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		-	-	750.018.735,00	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		-	-	50.000.000,00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		-	-	50.000.000,00	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	50.000.000,00			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	50.000.000,00	
	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan		-	-	700.018.735,00	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan		-	-	700.018.735,00	

	Sarana Pelayanan Umum					Sarana Pelayanan Umum					
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum					Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum					
			Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	10 Dokumen	700.018.735,00			Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	10 Dokumen	700.018.735,00	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		-	-	1.374.500.000,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		-	-	1.374.500.000,00	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		-	-	1.374.500.000,00	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		-	-	1.374.500.000,00	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa					Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa					
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5 Lembaga Kemasyarakatan	100.000.000,00			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5 Lembaga Kemasyarakatan	100.000.000,00	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan					Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan					
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	1.274.500.000,00			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	1.274.500.000,00	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		-	-	350.000.000,00	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		-	-	350.000.000,00	

	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		-	-	350.000.000,00	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		-	-	350.000.000,00	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan					Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan					
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	350.000.000,00			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	350.000.000,00	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		-	-	150.000.000,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		-	-	150.000.000,00	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		-	-	150.000.000,00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		-	-	150.000.000,00	
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia					Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia					
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka	50 Orang	80.000.000,00			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka	50 Orang	80.000.000,00	

			Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia					Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia			
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan					Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan					
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 Dokumen	70.000.000,00			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 Dokumen	70.000.000,00	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		-	-	180.000.000,00	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		-	-	180.000.000,00	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		-	-	180.000.000,00	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		-	-	180.000.000,00	
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa					Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa					
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4 Dokumen	50.000.000,00			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4 Dokumen	50.000.000,00	
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa					Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa					
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	4 Dokumen	80.000.000,00			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	4 Dokumen	80.000.000,00	
	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa					Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa					

			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	4 Dokumen	50.000.000,00			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	4 Dokumen	50.000.000,00	
	Kelurahan Kosambi Barat				2.301.000.000,00	Kelurahan Kosambi Barat				2.301.000.000,00	
	UNSUR KEWILAYAHAN				2.301.000.000,00	UNSUR KEWILAYAHAN				2.301.000.000,00	
	KECAMATAN				2.301.000.000,00	KECAMATAN				2.301.000.000,00	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		-	-	798.298.300,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		-	-	798.298.300,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		-	-	243.389.500,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah		-	-	243.389.500,00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	16.923.500,00			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	16.923.500,00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	170.360.000,00			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	170.360.000,00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					Penyediaan Bahan Logistik Kantor					
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	19.302.500,00			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	19.302.500,00	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	15.923.500,00			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	15.923.500,00	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu					Fasilitasi Kunjungan Tamu					

			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	20.880.000,00			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	20.880.000,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	-	554.908.800,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	-	554.908.800,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	26.020.800,00			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	26.020.800,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	528.888.000,00			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	528.888.000,00	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		-	-	1.352.701.700,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		-	-	1.352.701.700,00	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		-	-	1.352.701.700,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		-	-	1.352.701.700,00	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	19.398.450,00			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	19.398.450,00	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	218.540.050,00			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	218.540.050,00	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan	5 Pokmas / Ormas	1.092.071.600,00			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan	5 Pokmas / Ormas	1.092.071.600,00	

			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			
	Evaluasi Kelurahan					Evaluasi Kelurahan					
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	4 Laporan	22.691.600,00			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	4 Laporan	22.691.600,00	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		-	-	150.000.000,00	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		-	-	150.000.000,00	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		-	-	150.000.000,00	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		-	-	150.000.000,00	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan					Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan					
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	150.000.000,00			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	150.000.000,00	
	Kelurahan Salembaran Jaya				2.524.880.000,00	Kelurahan Salembaran Jaya				2.524.880.000,00	
	UNSUR KEWILAYAHAN				2.524.880.000,00	UNSUR KEWILAYAHAN				2.524.880.000,00	
	KECAMATAN				2.524.880.000,00	KECAMATAN				2.524.880.000,00	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		-	-	737.403.760,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		-	-	737.403.760,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		-	-	188.416.000,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah		-	-	188.416.000,00	

	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	16.923.500,00			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	16.923.500,00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	119.252.000,00			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	119.252.000,00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					Penyediaan Bahan Logistik Kantor					
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	15.158.000,00			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	15.158.000,00	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	12.962.500,00			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	12.962.500,00	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu					Fasilitasi Kunjungan Tamu					
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	24.120.000,00			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	24.120.000,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	-	548.987.760,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	-	548.987.760,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	20.099.760,00			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	20.099.760,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	528.888.000,00			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	528.888.000,00	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		-	-	1.637.476.240,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		-	-	1.637.476.240,00	

	DESA DAN KELURAHAN					DESA DAN KELURAHAN					
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		-	-	1.637.476.240,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		-	-	1.637.476.240,00	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	19.398.450,00			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	19.398.450,00	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	358.319.590,00			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	358.319.590,00	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	1.237.066.600,00			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	1.237.066.600,00	
	Evaluasi Kelurahan					Evaluasi Kelurahan					
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	4 Laporan	22.691.600,00			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	4 Laporan	22.691.600,00	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		-	-	150.000.000,00	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		-	-	150.000.000,00	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		-	-	150.000.000,00	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		-	-	150.000.000,00	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan					Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan					

			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	150.000.000,00			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	150.000.000,00	
	Keluarahan Dadap				2.653.760.000,00	Keluarahan Dadap				2.653.760.000,00	
	UNSUR KEWILAYAHAN				2.653.760.000,00	UNSUR KEWILAYAHAN				2.653.760.000,00	
	KECAMATAN				2.653.760.000,00	KECAMATAN				2.653.760.000,00	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		-	-	669.188.720,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		-	-	669.188.720,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		-	-	226.676.000,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah		-	-	226.676.000,00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	16.923.500,00			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	16.923.500,00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	136.288.000,00			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	136.288.000,00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					Penyediaan Bahan Logistik Kantor					
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	22.105.000,00			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	22.105.000,00	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	25.679.500,00			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	25.679.500,00	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu					Fasilitasi Kunjungan Tamu					

			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	25.680.000,00			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	25.680.000,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	-	442.512.720,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	-	442.512.720,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	34.434.720,00			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	34.434.720,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	408.078.000,00			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	408.078.000,00	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		-	-	1.834.571.280,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		-	-	1.834.571.280,00	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		-	-	1.834.571.280,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		-	-	1.834.571.280,00	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	19.404.690,00			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	19.404.690,00	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	475.254.200,00			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	475.254.200,00	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan	5 Pokmas / Ormas	1.317.220.790,00			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan	5 Pokmas / Ormas	1.317.220.790,00	

			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			
	Evaluasi Kelurahan					Evaluasi Kelurahan					
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	4 Laporan	22.691.600,00			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	4 Laporan	22.691.600,00	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		-	-	150.000.000,00	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		-	-	150.000.000,00	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		-	-	150.000.000,00	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		-	-	150.000.000,00	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan					Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan					
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	150.000.000,00			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	150.000.000,00	

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Tangerang membuka akses yang luas kepada pemangku kepentingan dalam memberikan usulan pembangunan di daerahnya. Usulan rencana pembangunan dapat berasal dari masyarakat melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) mulai dari tingkat Kelurahan, Kecamatan dan tingkat Kabupaten Tangerang. Selain itu usulan rencana pembangunan juga berasal dari kunjungan kerja Bupati dan Reses DPRD.

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat yang diusulkan oleh pemangku kepentingan berdasarkan pada hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Tangerang. Usulan kegiatan masyarakat selanjutnya akan diverifikasi oleh Kecamatan Kosambi berdasarkan syarat teknis yang telah ditentukan. Adapun tabel hasil kajian usulan program dan kegiatan masyarakat tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kabupaten Tangerang

Kecamatan Kosambi

No.	Usulan Kegiatan Pioritas	Lokasi	Volume	OPD Pelaksana
1	Pemeliharaan jalan H.Ana (Gg. Setan)	Desa Kosambi Timur	150m x 6m	Kec. Kosambi
2	Pemeliharaan Jalan RW 18 Ds. Kosambi Timur	Desa Kosambi Timur	150m x 4m	Kec. Kosambi
3	Pemeliharaan jalan rw 004 Desa Kosambi Tiur	Desa Kosambi Timur	200m x 2,5m	Kec. Kosambi
4	Hotmix Jalan rw 011 desa Kosamb Timur	Desa Kosambi Timur	400m x 3m	Kec. Kosambi
5	Pemeliharaan jalan rw 003 desa Kosambi Timur	Desa Kosambi Timur	200m x 2,5m	Kec. Kosambi
6	Pemeliharaan jalan RW 009 Ds. Cengklong	Desa Cengklong	200m x 2m	Kec. Kosambi
7	Pemeliharaan saluran air dan gorong-gorong Desa Rawarengas	Desa Rawarengas	200m x 1m	Kec. Kosambi
8	Normalisasi kali bojong renged – Kosambi	Desa Rawarengas, rawaburung, belimbing, cengklong dan Kosambi Barat	5.000m x 7m	Bina marga & SDA Provinsi Banten
9	lanjutan Pemeliharaan jalan desa salembaran jati	Desa salembaran jati	150m x 4m	Kec. Kosambi
10	Bedah Rumah tidk layak huni (Rumah Ibu Ina/iye, Bpk Malur, Ibu Rumsih, Bpk jaya dan Bpk usman)	Desa salembaran jati	5 unit	Kec. Kosambi
11	Pemeliharaan saluran air Rw 001	Desa Jatimulya		

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN KOSAMBI 2025

Kualitas tatakelola pemerintahan (*good governance*) adalah prasyarat tercapainya sasaran pembangunan daerah, baik jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat, serta peningkatan kapasitas birokrasi melalui pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Untuk mencapai sasaran sesuai indikator sasaran yang telah ditetapkan, Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang menyusun Rencana kerja tahun 2025 yang mana Program dan kegiatan yang dirumuskan diarahkan untuk mewujudkan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.

Rencana Kerja Pagu Indikatif tahun 2025 sebesar Rp23.598.391.477 adapun rincian Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Kosambi Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1
Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Kosambi Tahun 2025

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
						Kecamatan Kosambi			16.118.751.477,00
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			16.118.751.477,00
	7	01				KECAMATAN			16.118.751.477,00
1	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	-	-	13.314.232.742,00
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	105.000.000,00
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	35.000.000,00
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	35.000.000,00
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	35.000.000,00
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	10.528.751.477,00
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			

							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55 Orang/bulan	10.468.751.477,00
	7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	25.000.000,00
	7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	35.000.000,00
	7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	25.000.000,00
	7	01	01	2.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD			
							Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	25.000.000,00
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	145.000.000,00
	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	45.000.000,00
	7	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	55 Orang	100.000.000,00
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	535.000.000,00

	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	15.000.000,00
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	150.000.000,00
	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	50.000.000,00
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	50.000.000,00
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	50.000.000,00
	7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	160.000.000,00
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	60.000.000,00
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.417.000.000,00
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	120.000.000,00

	7	0 1	0 1	2. 08	00 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.297.000.000,00
	7	0 1	0 1	2. 09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	558.481.265,00
	7	0 1	0 1	2. 09	00 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit	85.000.000,00
	7	0 1	0 1	2. 09	00 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit	263.481.265,00
	7	0 1	0 1	2. 09	00 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	60.000.000,00
	7	0 1	0 1	2. 09	00 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	150.000.000,00
2	7	0 1	0 2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	750.018.735,00
	7	0 1	0 2	2. 02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja	-	-	50.000.000,00

						Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			
	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	50.000.000,00
	7	01	02	2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	-	-	700.018.735,00
	7	01	02	2.03	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum			
							Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	10 Dokumen	700.018.735,00
3	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	1.374.500.000,00
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-	1.374.500.000,00
	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5 Lembaga Kemasyarakatan	100.000.000,00
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan	12 Laporan	1.274.500.000,00

							Masyarakat di Wilayah Kecamatan		
4	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-	350.000.000,00
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-	350.000.000,00
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	350.000.000,00
5	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-	150.000.000,00
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-	150.000.000,00
	7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia			

							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	50 Orang	80.000.000,00
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			
							Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 Dokumen	70.000.000,00
6	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-	180.000.000,00
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-	180.000.000,00
	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa			
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4 Dokumen	50.000.000,00
	7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	4 Dokumen	80.000.000,00

	7	01	06	2.01	0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa			
							Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	4 Dokumen	50.000.000,00
						Kelurahan Kosambi Barat			2.301.000.000,00
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			2.301.000.000,00
	7	01				KECAMATAN			2.301.000.000,00
7	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	-	-	798.298.300,00
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	243.389.500,00
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	16.923.500,00
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	170.360.000,00
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	19.302.500,00
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	15.923.500,00
	7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	20.880.000,00

	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	554.908.800,00
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	26.020.800,00
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	528.888.000,00
8	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	1.352.701.700,00
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	1.352.701.700,00
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	19.398.450,00
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	218.540.050,00
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	1.092.071.600,00
	7	01	03	2.02	0004	Evaluasi Kelurahan			
							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	4 Laporan	22.691.600,00

9	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-	150.000.000,00
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-	150.000.000,00
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	150.000.000,00
						Kelurahan Salembaran Jaya			2.524.880.000,00
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			2.524.880.000,00
	7	01				KECAMATAN			2.524.880.000,00
10	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	737.403.760,00
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	188.416.000,00
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	16.923.500,00
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	119.252.000,00

	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	15.158.000,00
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	12.962.500,00
	7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	24.120.000,00
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	548.987.760,00
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	20.099.760,00
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	528.888.000,00
11	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	1.637.476.240,00
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	1.637.476.240,00
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	19.398.450,00
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			

							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	358.319.590,00
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	1.237.066.600,00
	7	01	03	2.02	0004	Evaluasi Kelurahan			
							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	4 Laporan	22.691.600,00
12	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-	150.000.000,00
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-	150.000.000,00
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	150.000.000,00
						Kelurahan Dadap			2.653.760.000,00
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			2.653.760.000,00
	7	01				KECAMATAN			2.653.760.000,00
13	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	-	-	669.188.720,00
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	226.676.000,00

	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	16.923.500,00
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	136.288.000,00
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	22.105.000,00
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	25.679.500,00
	7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	25.680.000,00
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	442.512.720,00
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	34.434.720,00
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	408.078.000,00
14	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	1.834.571.280,00

	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	1.834.571.280,00
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	19.404.690,00
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	475.254.200,00
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	1.317.220.790,00
	7	01	03	2.02	0004	Evaluasi Kelurahan			
							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	4 Laporan	22.691.600,00
15	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-	150.000.000,00
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-	150.000.000,00
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	150.000.000,00
	J U M L A H								**23.598.391.477,00**

BAB IV
PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang Tahun 2025 merupakan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2025. Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang tahun 2025 ini telah diupayakan sebaik-baiknya, terukur dan akuntabel, disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja pada pada tahun tahun sebelumnya, isu–isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, serta memperhatikan aspirasi masyarakat.

Dalam pelaksanaan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang akan mengacu pada aturan-aturan yang berlaku sehingga pencapaian terhadap sasaran yang diharapkan akan terpenuhi. Jika dalam proses selanjutnya ternyata kondisi keuangan daerah tidak dapat memenuhi pagu indikatif yang dialokasikan untuk Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang dimana implikasinya Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang akan mengurangi jumlah pagu kegiatan dan merasionalisasi kembali anggaran pada setiap kegiatan yang ada. Dalam mengeliminasi dan merasioanalisasi RENJA Perubahan yang ada, Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang akan benar-benar menelaah dimana kegiatan-kegiatan yang dapat dieliminasi tersebut adalah kegiatan-kegiatan yang paling kecil peranannya dalam pencapaian target dan sasaran dalam RENSTRA.

Keberhasilan pelaksanaan Renja Perubahan tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan dan disiplin para penyelenggara pemerintahan, serta peran aktif masyarakat. Dalam kaitan itu mohon aparat pemerintah khususnya Aparatur Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang dan lembaga lainya bersama masyarakat perlu bersungguh-sungguh dalam melaksanakan program-program pembagunan sebagaimana yang tertuang dalam Renja Perubahan ini.

Demikian Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang disusun dengan harapan dapat menjadi acuan dalam Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang tahun 2025 dan dapat menjadi pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah dalam mengalokasikan anggaran pada Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang.

48. Kecamatan Pagedangan

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, Proses penyusunan Renja Perubahan OPD terdiri dari tiga tahapan utama yaitu persiapan penyusunan, tahapan penyusunan rancangan, dan tahap penetapan rencana kerja perubahan OPD. Penyusunan Renja Perubahan OPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja Perubahan OPD yang definitif.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyusun Rencana Kerja Perubahan (Renja - P) OPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Renja Perubahan OPD Kecamatan Pagedangan merupakan dokumen perencanaan OPD Kecamatan untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan RKPD Kabupaten Tangerang.

Dokumen Renja Perubahan Kecamatan Pagedangan Tahun 2025 merupakan satu kesatuan dokumen yang tidak terpisahkan dari Keputusan Camat Pagedangan Nomor : 900/Kep. –Kec.Pgd/2025 tentang Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Organisasi Perangkat Daerah (Rejnja – P OPD) Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang Tahun 2025, sehingga dalam melakukan perubahan berpedoman pada peraturan tersebut yang sudah melalui proses tahapan perencanaan sesuai ketentuan yang berlaku.

Rencana Kerja Perubahan (RENJA-P) Kecamatan Pagedangan tahun 2025, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi Kecamatan Kecamatan Pagedangan tahun 2024 – 2026 seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Kecamatan Pagedangan Tahun 2024 – 2026 yaitu :

"Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Tangerang yang Religius, Cerdas, Sehat dan Sejahtera"

Visi tersebut secara eksplisit dapat dijelaskan bahwa :

Religius mengandung bahwa nilai-nilai agama mendasari sikap dan perilaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai dengan prinsip-prinsip keagamaan yang di anut.

Cerdas yang mengandung makna memiliki wawasan, kemampuan, dan keterampilan yang cukup terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pencapaian tingkat pendidikan formal sehingga mendukung kualitas sumber daya masyarakat sebagai subyek pembangunan.

Sehat yang mengandung makna memiliki keadaan sumber daya manusia yang sempurna baik fisik, mental dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

Sejahtera mengandung makna memiliki tingkat kesejahteraan tertentu yang didukung oleh terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan dan *papan secara merata serta memiliki daya beli yang memadai*

sehingga mampu mewujudkan kemandirian didukung kelestarian lingkungan hidup

Misi adalah pernyataan tentang upaya yang harus dilakukan dalam usaha mewujudkan Visi. Misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan Visi Kabupaten Tangerang Tahun 2024 -2026 tersebut akan ditempuh melalui Enam misi pembangunan daerah sebagai berikut :

1. Meningkatkan penerapan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyaraka menuju masyarakat yang religius.
2. Meningkatkan akses, mutu dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas dan sehat.
3. Mengembangkan ekonomi daerah yang kompetiti dan berbasis kerakyatan
4. 4. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan dan akuntabel.
5. 5. Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan Rencana Tata Ruang wilayah
6. 6. Mengembangkan inovasi daerah dalam rangka meningkatkan kualitas daya saing daerah, masyarakat dan pelaku pembangunan lainnya.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Pagedangan Tahun 2024 antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang_undang Nomor 4 Tahun 1968 Tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 632);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

19. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
20. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
21. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
23. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara perencanaan, pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daearah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O17 Nomor 1312);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 14);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
30. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi
31. Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru;
32. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentangRencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 26);

33. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten 2010-2030;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2008 Nomor 01, Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0108);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2009 Nomor 02, Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0209);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 09 Tahun 2009 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2009 Nomor 12);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2016 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2016 Nomor 1611);
39. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah;
40. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 33 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2023 Nomor 33).
41. Permendagri Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.
42. Keputusan Camat Pagedangan Nomor : 900/Kep. –Kec.Pgd/2025 Tentang Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Organisasi Perangkat Daerah (RENJA - P OPD) Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang Tahun 2025

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Perubahan Organisasi Perangkat Daerah (RENJA – P OPD) Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang ini disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam OPD serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Pagedangan Tahun 2025 adalah :

a. Sebagai input dalam rangka perbaikan pelaksanaan tugas dan peningkatan pembangunan satu tahun kedepan;
b. Mewujudkan sinkronisasi dan sinergitas antara Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026, Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Pagedangan Tahun 2024-2026 dengan visi, misi, tujuan, kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang;

c. Membuat acuan perencanaan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD Kecamatan;
d. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi Antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran;
e. Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat berikutnya.

1.4 Sistimatika Penyusunan

Sistimatika penyusunan Renja OPD Kecamatan Pagedangan Tahun 2024 adalah sebagai berikut ;

1. **BAB I.**
   PENDAHULUAN
   1.1 Latar Belakang
   1.2 Landasan Hukum
   1.3 Maksud dan Tujuan
   1.4 Sistematika Penulisan

2. **BAB II.**
   EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU
   2.1 *Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II*
   2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD
   2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
   2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
   2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

3. **BAB III.**
   TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
   3.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

4. **BAB IV.**
   PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

*2.*1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

a) Realisasi Program/Kegiatan yang telah memenuhi target Kinerja Hasil/Keluaran yang direncanakan.

Berdasarkan hasil pelaksanaan Program dan kegiatan Triwulan II Tahun Anggaran 2025 Kecamatan Pagedangan Telah melaksanakan 6 Program yang didalamnya terdapat 16 kegiatan dan 41 Sub Kegiatan dengan jumlah pagu anggaran sebesar **Rp 27.721.071.091** dan serapan anggaran Per 05 Juni 2025 mencapai ***37,20***% atau sebesar **Rp 13.746.428.608** adapun program yang berkaitan dengan sasaran renstra Kecamatan Pagedangan telah mencapai hasil yang cukup maksimal, yaitu :

a. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum

Pada sasaran Renstra ini terdapat beberapa program yang mendukung tercapainya renstra diantaranya :

a) Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum;

b. Meningkatnya akuntabilitas Perangkat Daerah

Pada sasaran Renstra ini terdapat beberapa program yang mendukung tercapainya renstra diantaranya :

a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
b) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.

c. Meningkatnya pelayanan masyarakat

Pada sasaran Renstra ini terdapat beberapa program yang mendukung tercapainya renstra diantaranya :

a) Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik;
b) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan.
c) Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

b) Realisasi Program/Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan Tahun Anggran 2025 per tanggal 05 Juni 2025, tidak terdapat Program yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang telah direncanakan.

Hal ini tentunya menjadi sebuah pencapaian yang cukup bagus dalam melaksanakan Program dan kegiatan sehingga mendapatkan hasil sesuai target kinerja yang telah direncanakan.

Berikut adalah tabel Program dan Kegiatan pada OPD Kecamatan Pagedangan

yang tidak memenuhi target Kinerja hasil/Keluaran yang direncanakan :

No	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi		Selisih
			Rupiah	Persentase	Rupiah
1	2	3	4	5	6 = 4-3
1	**NIHIL..**	**-**	**-**	**-**	**-**
	✓ Nihil..	-	-	-	-

Tabel 2.1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PROGRAM RENJA OPD DAN PENCAPAIAN RENSTRA OPD S/D 05 JUNI TAHUN 2025
OPD KECAMATAN PAGEDANGAN KABUPATEN TANGERANG

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan \ Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi CapaianTarget Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan2025	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7.01	**KECAMATAN**									
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan**	100	100	10.946.866.338	10.759.099.659	98,28	100	0	0
7.01.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daer	7	100	260.080.500	259.765.500	99,88	100	0	0
7.01.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2	100	6.686.214.458	6.517.074.624	97,47	100	0	0
7.01.01.2.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	2	0	0	0	0	0	0	0
7.01.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1	100	104.610.600	104.495.000	104.610.600	100	0	0
7.01.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	8	100	501.286.100	501.141.900	501.286.100	100	0	0
7.01.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2	100	27.525.900	27.525.900	27.525.900	100	0	0
7.01.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Dokumen Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3	100	2.359.408.100	2.350.046.055	2.359.408.100	100	0	0
7.01.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4	100	1.007.740.680	999.050.680	1.007.740.680	100	0	0
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Prosentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar Kecamatan Pagedangan**	**89,70**	100	13.529.039.304	13.491.796.000	99,72	100	0	0

		Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik Kecamatan Pagedangan	**90**	100	13.529.039.304	13.491.796.000	99,72	100	0	0
7.01.02.2.02	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	89,70	100	39.982.500	39.982.500	100,00	100	0	0
7.01.02.2.03	Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Presentase Infrastruktur Yang Dipelihara Tersedianya Dokumen Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	90	100	13.489.056.804	13.451.813.500	99,72	100	0	0
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan**	**90**	100	4.025.647.470	4.017.369.910	4.025.647.470	100	0	0
7.01.03.2.01	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	10	100	2.232.171.750	2.228.131.510	2.232.171.750	100	0	0
7.01.03.2.06	Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	50	0	0	0	0	0	0	0
7.01.03.2.01	Kegiatan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana Kelurahan yang dibangun	100	100	1.769.140.120	1.764.902.800	99,76	100	0	0
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti**	**80**	100	98.469.400	98.469.400	100,00	100	0	0
7.01.04.2.01	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Tersedianya Dokumen Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	80	100	98.469.400	98.469.400	100,00	100	0	0
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti**	**100**	100	129.336.400	129.336.400	100,00	100	0	0
7.01.05.2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Tersedianya Dokumen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	2	100	129.336.400	129.336.400	100,00	100	0	0
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase tertib administrasi pemerintahan desa**	**90**	100	245.020.900	245.020.900	100,00	100	0	0
7.01.06	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Tersedianya Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	10	100	245.020.900	245.020.900	100,00	100	0	0

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pelayanan Kecamatan Pagedangan Kinerja Pelayanan di Kecamatan Pagedangan dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja :

1. Tersedianya pemenuhan sarana dan prasarana Paten di Kecamatan
2. Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar
3. Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik
4. Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan/pemberdayaan
5. Jumlah organisasi pemuda yang dibina
6. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintahan desa

Meningkatnya Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Lingkup analisis kinerja pelayanan di Kecamatan Pagedangan meliputi analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal yang dapat menghasilkan kesimpulan analisis berupa daftar prioritas faktor lingkungan, baik internal maupun eksternal, serta dampaknya terhadap masa depan organisasi, yang selanjutnya akan berpengaruh pada hubungan internal organisasi pada gilirannya dapat ditentukan faktor kunci keberhasilan antara lain :

1. **Lingkungan Internal**
   - Kekuatan ;
     a. Visi dan misi organisasi yang jelas
        Kekuatan hukum tentang tugas pokok dan fungsi kecamatan
        Adanya alokasi anggaran bagi kecamatan
     b. Kewenangan koordinasi di tingkat kecamatan
        Adanya sarana dan prasarana
   - Kelemahan ;
     a. Jumlah dan kualitas SDM yang belum memadai.
     b. Lemahnya pelaksanaan koordinasi dengan pemerintahan kabupaten dan instansi teknis lainnya
     c. Belum tertib dan lemahnya sistem administrasi organisasi
        Belum optimalnya penyusunan kebijakan dan perencanaan

2. **Lingkungan Eksternal**
   - Peluang
     a. RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2024 – 2026
     b. Agenda pembangunan tahunan kabupaten Tangerang
     c. Tuntutan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dan akuntabilitas pemerintahan
     d. Komitmen Bupati dalam pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas prasarana wilayah dan pelayanan publik
     e. Keterkaitan institusional (koordinatif) pemerintahan yang ada di wilayah dengan kecamatan
     f. Dukungan dan partisipasi masyarakat luas
     g. Diklat peningkatan kualitas aparatur
     h. Kehidupan sosial, budaya dan keagamaan masyarakat
     i. Kebutuhan akan rasa aman, tertib dan tentram

   - Ancaman :

a. Prasarana wilayah yang masih rendah dan kurang memadai
b. Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan
c. Pratek-praktek yang merusak akuntabilitas organisasi oleh aparaturnya
d. Kebijakan instansi teknis yang kurang mendukung pemberdayaan masayarakat.
e. Kecenderungan masyarakat untuk mengabaikan peraturan dan kewajiban yang mengikat

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN PAGEDANGAN KABUPATEN TANGERANG S.D TAHUN 2025

No	Indikator	Standar Pelayanan Minimal	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analis
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	
1	Jumlah Data Nomor Induk Kependudukan yang terinput	Penginputan Data Kartu Tanda Penduduk		5280	5808	6600	0	0	6600	6864	
2	Jumlah Data Nomor Kartu Keluarga yang terinput	Penginputan Data Kartu Keluarga		5016	5544	6072	0	0	6072	6600	
3	Jumlah Data Nomor Induk Kependudukan yang terinput	Penginputan Data kartu Identitas Anak		528	792	1056	0	0	1056	1320	
4	Jumlah Surat Keterangan Pindah Datang Antar Desa dan Kecamatan dalam Satu Kabupaten yang dilayani	Surat Keterangan Pindah Datang Antar Desa dan Kecamatan dalam Satu Kabupaten		1320	1584	1848	0	0	1848	2112	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Pagedangan bahwa ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut :

a. Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Tangerang kepada Camat di bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Tangerang;
b. Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan insfrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh–sungguh memperhatikan Company/Coorperate Sosial Responsipility (CSR),

maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;

c. Pelayanan Prima. Kecamatan sebagai salah satu OPD di Pemerintah Kabupaten Tangerang yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika ativitas masyarakat;
d. Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur;
e. Arah Kebijakan dan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat tentang pengembangan bersama bidang pariwisata yang memiliki potensi wisata yang cukup layak untuk dikembangkan, maka Kecamatan Pagedangan harus betul-betul memanfaatkan posisi dan potensi yang dimiliki, guna mendorong kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat;

a) Rancangan kerangka ekonomi daerah
b) Program prioritas pembangunan daerah dan
c) Rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan.

Rencana Kerja Kecamatan Pagedangan berdasarkan RKPD Kabupaten Tangerang sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan Renja OPD se Kabupaten Tangerang yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di wilayah Kecamatan Pagedangan. Untuk lebih jelasnya mengenai review rancangan awal RKPD Tahun 2025 dapat dilihat Tabel 2.4

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025
KABUPATEN TANGERANG

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Sumber Dana
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kec. Pagedangan**	***Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Kec. Pagedangan***	**100 %**	***11.210.040.566***	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Kec. Pagedangan**	***Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Kec. Pagedangan***	**100 %**	***13.542.814.291***	**APBD**
a	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat daerah	Kec. Pagedangan	*Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun*	7 dok	*201.528.000*	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat daerah	Kec. Pagedangan	*Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun*	7 dok	*126.090.000*	APBD
b	Administrasi keuangan	Kec. Pagedangan	*Jumlah dokumen dokumen adminstrasi keuangan*	2 Dok	*7.040.369.166*	Administrasi keuangan	Kec. Pagedangan	*Jumlah dokumen dokumen adminstrasi keuangan*	2 Dok	*8.726.843.644*	APBD
c	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kec. Pagedangan	*Tersedianya Dokumen Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah*	2 Dok	*27.704.000*	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Kec. Pagedangan	*Jumlah dokumen Pembinaan Pegawai*	1 Dok	*12.018.000*	APBD
d	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Kec. Pagedangan	*Jumlah dokumen Pembinaan Pegawai*	1 Dok	*267.730.400*	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Kec. Pagedangan	*Jumlah dokumen Pembinaan Pegawai*	1 Dok	*261.075.000*	APBD
e	Administrasi umum perangkat daerah	Kec. Pagedangan	*Jumlah dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah*	8 Dok	*496.525.100*	Administrasi umum perangkat daerah	Kec. Pagedangan	*Jumlah dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah*	8 Dok	*765.915.710*	APBD
t	*Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	Kec. Pagedangan	*Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah*	2 Dok	*156.236.300*	*Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	Kec. Pagedangan	*Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah*	2 Dok	*130.148.600*	APBD
g	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan Daerah	Kec. Pagedangan	*Jumlah dokumen Jasa Penunjang*	3 Dok	*2.373.464.600*	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan Daerah	Kec. Pagedangan	*Jumlah dokumen Jasa Penunjang*	3 Dok	*2.781.276.225*	APBD
h	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang Urusan pemerintahan daerah	Kec. Pagedangan	*Jumlah dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	3 Dok	*646.483.000*	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang Urusan pemerintahan daerah	Kec. Pagedangan	*Jumlah dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	3 Dok	*739.447.112*	APBD
2		**Kec. PAGED**	***Persentase Pemeliharaan Fasilitas***	**89,70 %**	***908.794.000***		**Kec. PAGED**	***Persentase Pemeliharaan Fasilitas***	**100 %**	*9.682.668.000*	**APBD**

	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**ANGAN**	***Umum yang terpelihara***			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**ANGAN**	***Umum yang terpelihara***			
			Persentase Pemenuhan PATEN Sesuai Standar	**90 %**				***Persentase Pemenuhan PATEN Sesuai Standar***	**100 %**		**APBD**
a	Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah Yang ada di kecamatan	Kec. Pagedangan	*Jumlah Dokumen Laporan Pelayanan di Kecamatan PAGEDANGAN*	1 Lap	*58.726.000*	Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah Yang ada di kecamatan	Kec. Pagedangan	*Jumlah Dokumen Laporan Pelayanan di Kecamatan PAGEDANGAN*	4 Lap	*39.600.000*	APBD
b	Koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana Pelayanan umum	Kec. Pagedangan	*Jumlah Dokumen Pemeliharan*	*92%*	850.068.000	Koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana Pelayanan umum	Kec. Pagedangan	Jumlah infrastruktur yang dipelihara	4 Jenis	9.643.068.000	APBD
3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kec. Pagedangan**	**Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan**	**90 %**	***4.355.747.400***	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kec. Pagedangan**	**Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan**	**100 %**	***4.079.724.600***	**APBD**
a	Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Kec. Pagedangan	*jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan/pemberdayaan*	10 Kel	*1.416.247.800,00*	Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Kec. Pagedangan	*jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan/pemberdayaan*	11 Dok	*1.020.609.400*	APBD
b	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kec. Pagedangan	*Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara*	50 Kel	*306.101.500*	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kec. Pagedangan	*Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara*	50 Kel	*242.407.500*	APBD
c	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kec. Pagedangan	*Terlaksananya Program Masyarakat Desa dan Kelurahan*	100%	*3.169.400.000*	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kec. Pagedangan	*Terlaksananya Program Masyarakat Desa dan Kelurahan*	100%	*2.816.707.700*	APBD
4	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Kec. Pagedangan**	***Persentase Gangguan Trantibum yang ditindak Lanjuti***	**80 %**	***229.117.800***	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Kec. Pagedangan**	***Persentase Gangguan Trantibum yang ditindak Lanjuti***	**80 %**	***142.136.800***	**APBD**
a	Koordinasi upaya penyelenggaraan	Kec. Pagedangan	*Jumlah Dokumen Gangguan Trantibum*	10 Dok	*229.117.800*	Koordinasi upaya penyelenggaraan	Kec. Pagedangan	*Jumlah Dokumen Gangguan Trantibum*	10 Dok	*142.136.800*	APBD

	ketenteraman Dan ketertiban umum					ketenteraman Dan ketertiban umum					
5	***PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM***	**Kec. Pagedangan**	***Persentase Rekomendasi yang ditindak lanjuti***	**100 %**	***262.529.800***	***PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM***	**Kec. Pagedangan**	***Persentase Rekomendasi yang ditindak lanjuti***	**100 %**	***178.323.800***	**APBD**
a	*Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah*	Kec. Pagedangan	*Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi*	**2 Dok**	*262.529.800*	*Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah*	Kec. Pagedangan	*Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi*	**2 Dok**	*178.323.800*	APBD
6	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Kec. Pagedangan**	***Persentase Tertib Administrasi Pemerintahan Desa***	**90 %**	***134.629.600***	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Kec. Pagedangan**	***Persentase Tertib Administrasi Pemerintahan Desa***	**90 %**	***95.403.600***	**APBD**
a	Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan Dan pengawasan pemerintahan desa	Kec. Pagedangan	*Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa*	10 Lap	*134.629.600*	Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan Dan pengawasan pemerintahan desa	Kec. Pagedangan	*Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa*	10 Lap	*95.403.600*	APBD
JUMLAH				**100 %**	***17.100.859.166***	**JUMLAH**			**100 %**	***27.721.071.091***	**APBD**

2.5. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum dan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati dalam rangka penguatan otonomi daerah diarahkan pada :

1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan;
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan;
3. Meningkatnya Kinerja Pemerintahan;

Telaah usulan Program dan Kegiatan masyarakat ini didasari oleh pemikiran bahwa dalam rangka mewujudkan Misi Kecamatan Pagedangan maka Ketiga hal tersebut diatas perlu dilaksanakan dan dicapai oleh pengemban delegasi.

Tabel T-C. 32
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2025 Kecamatan Pagedangan

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/ VOLUME	CATATAN
1	*Pengadaan Sarana dan Prasarana Peustakaan Desa*	*Desa Jatake*	Pemenuhan sarana dan prasarana	*100.000.000*	
2	*Peningkatan Sarana dan Prasarana(Rehab)*	*SDN Kp Kandang Desa Jatake*	Pemenuhan sarana dan prasarana	*150.000.000*	
3	*Pengadaan Taman Baca*	*Desa Jatake*	Pemenuhan sarana dan prasarana	*100.000.000*	
4	*Aplikasi Manajemen Kearsipan Digital Desa*	*Desa Jatake*	Pemenuhan sarana dan prasarana	*10.000.000*	
5	*Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni*	*Desa Jatake*	Pemenuhan sarana dan prasarana	*30.000.000*	
6	*Pemberian Makan Tambahan (PMT) Balita*	*Desa Jatake*	Pemenuhan sarana dan prasarana	*12.000.000*	
7	*Budidaya Bebek Pedaging*	*Desa Jatake*	Pemenuhan sarana dan prasarana	*100.000.000*	
8	*Pelatihan Kewirausahaan (Sablon)*	*Desa Jatake*	Pemenuhan sarana dan prasarana	*25.000.000*	
9	*Peningkatan Sarana dan Prasarana (Hotmix)*	*Kp Jatake*	Pemenuhan sarana dan prasarana	*200.000.000*	
10	*Peningkatan Sarana dan Prasarana (Paving)*	*Kp Jatake*	Pemenuhan sarana dan prasarana	*200.000.000*	
11	*Pengadaan Sarana dan Prasarana Peustakaan Desa*	*Desa Jatake*	Pemenuhan sarana dan prasarana	*100.000.000*	
12	*Peningkatan Sarana dan Prasarana(Rehab)*	*SDN Kp Kandang Desa Jatake*	Pemenuhan sarana dan prasarana	*150.000.000*	
13	*Pengadaan Taman Baca*	*Desa Jatake*	Pemenuhan sarana dan prasarana	*100.000.000*	
14	*Aplikasi Manajemen Kearsipan Digital Desa*	*Desa Jatake*	Pemenuhan sarana dan prasarana	*10.000.000*	
15	*Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni*	*Desa Jatake*	Pemenuhan sarana dan prasarana	*30.000.000*	
16	*Pemberian Makan Tambahan (PMT) Balita*	*Desa Jatake*	Pemenuhan sarana dan prasarana	*12.000.000*	
17	*Budidaya Bebek Pedaging*	*Desa Jatake*	Pemenuhan sarana dan prasarana	*100.000.000*	
18	*Pelatihan Kewirausahaan (Sablon)*	*Desa Jatake*	Pemenuhan sarana dan prasarana	*25.000.000*	
19	*Peningkatan Sarana dan Prasarana (Hotmix)*	*Kp Jatake*	Pemenuhan sarana dan prasarana	*200.000.000*	
20	*Peningkatan Sarana dan Prasarana (Paving)*	*Kp Jatake*	Pemenuhan sarana dan prasarana	*200.000.000*	
21	*Pengadaan Sarana dan Prasarana Peustakaan Desa*	*Desa Cihuni*	Pemenuhan sarana dan prasarana	*100.000.000*	

22	*Pengadaan Mobil Operasional PKK*	*Desa Cihuni*	Pemenuhan sarana dan prasarana	*250.000.000*	
23	*Pengadaan Taman Baca*	*Desa Cihuni*	Pemenuhan sarana dan prasarana	*100.000.000*	
24	*Aplikasi Manajemen Kearsipan Digital Desa*	*Desa Cihuni*	Pemenuhan sarana dan prasarana	*10.000.000*	
25	*Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni*	*Desa Cihuni*	Pemenuhan sarana dan prasarana	*30.000.000*	
26	*Pemberian Makan Tambahan (PMT) Balita*	*Desa Cihuni*	Pemenuhan sarana dan prasarana	*12.000.000*	
27	*Budidaya Ayam Kampung*	*Desa Cihuni*	Pemenuhan sarana dan prasarana	*100.000.000*	
28	*Pelatihan Kewirausahaan (Sablon)*	*Desa Cihuni*	Pemenuhan sarana dan prasarana	*25.000.000*	
29	*Pengadaan Sarana dan Prasarana Peustakaan Desa*	*Desa Karang Tengah*	Pemenuhan sarana dan prasarana	*100.000.000*	
30	*Peningkatan Sarana Dan Prasarana (Jembatan)*	*Kali Cimanceuri RT 001 RW 004 Desa Karang Tengah*	Pemenuhan sarana dan prasarana	*150.000.000*	
31	*PJU (Penerangan Jalan Umum)*	*Kp Kabasiran RW 04 Desa Karang Tengah*	Pemenuhan sarana dan prasarana	*250.000.000*	
32	*PJU (Penerangan Jalan Umum)*	*Kp Kabasiran RW 06 Desa Karang Tengah*	Pemenuhan sarana dan prasarana	*250.000.000*	
33	*PJU (Penerangan Jalan Umum)*	*Kp Rancahaur Desa Karang Tengah*	Pemenuhan sarana dan prasarana	*250.000.000*	
34	*Pengadaan Taman Baca*	*Desa Karang Tengah*	Pemenuhan sarana dan prasarana	*100.000.000*	
35	*Aplikasi Manajemen Kearsipan Digital Desa*	*Desa Karang Tengah*	Pemenuhan sarana dan prasarana	*10.000.000*	
36	*Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni*	*Desa Karang Tengah*	Pemenuhan sarana dan prasarana	*30.000.000*	
37	*Pemberian Makan Tambahan (PMT) Balita*	*Desa Karang Tengah*	Pemenuhan sarana dan prasarana	*12.000.000*	
38	*Budidaya Bebek Pedaging*	*Desa Karang Tengah*	Pemenuhan sarana dan prasarana	*100.000.000*	
39	*Pengadaan Sarana dan Prasarana Peustakaan Desa*	*Desa Lengkong Kulon*	Pemenuhan sarana dan prasarana	*100.000.000*	
40	*Pengadaan Taman Baca*	*Desa Lengkong Kulon*	Pemenuhan sarana dan prasarana	*100.000.000*	
41	*Aplikasi Manajemen Kearsipan Digital Desa*	*Desa Lengkong Kulon*	Pemenuhan sarana dan prasarana	*10.000.000*	
42	*Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni*	*Desa Lengkong Kulon*	Pemenuhan sarana dan prasarana	*30.000.000*	
43	*Pemberian Makan Tambahan (PMT) Balita*	*Desa Lengkong Kulon*	Pemenuhan sarana dan prasarana	*12.000.000*	
44	*Budidaya Ikan Air Tawar*	*Desa Lengkong Kulon*	Pemenuhan sarana dan prasarana	*50.000.000*	
45	*Betonisasi Jalan*	*Kp Pabuaran RT 004 RW 006 Desa Lengkong Kulon*	Pemenuhan sarana dan prasarana	*200.000.000*	
46	*Peningkatan Jalan Hotmix*	*Kp Sawah RT 005 RW 003 Desa Lengkong Kulon*	Pemenuhan sarana dan prasarana	*200.000.000*	
47	*Peningkatan Jalan Hotmix*	*Kp Kebon Pala RT 003 RW 005 Desa Lengkong Kulon*	Pemenuhan sarana dan prasarana	*200.000.000*	
48	*Peningkatan Saluran Air*	*Spal Uditch Kp. Pabuaran RT 004 RW 006 Desa Lengkong Kulon*	Pemenuhan sarana dan prasarana	*200.000.000*	
49	*Pengadaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan Desa*	*Desa Cicalengka*	Pemenuhan sarana dan prasarana	*100.000.000*	
50	*Pengadaan Taman Baca*	*Desa Cicalengka*	Pemenuhan sarana dan prasarana	*100.000.000*	
51	*Aplikasi Manajemen Kearsipan Digital Desa*	*Desa Cicalengka*	Pemenuhan sarana dan prasarana	*10.000.000*	
52	*Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni*	*Desa Cicalengka*	Pemenuhan sarana dan prasarana	*30.000.000*	
53	*Pemberian Makan Tambahan (PMT) Balita*	*Desa Cicalengka*	Pemenuhan sarana dan prasarana	*12.000.000*	
54	*Budidaya Ikan Air Tawar*	*Desa Cicalengka*	Pemenuhan sarana dan prasarana	*100.000.000*	
55	*Peningkatan Saluran Air*	*Kp. Pagedangan RT. 003/01 Desa*	Pemenuhan sarana dan prasarana	*355.689.000*	

		Cicalengka (Jl. Malagas - Jl. Baru)			
56	*Peningkatan Saluran Air*	*Kp. Pagedangan RT. 003/01 Desa Cicalengka (depan rumah Saprut)*	Pemenuhan sarana dan prasarana	*130.115.000*	
57	*Peningkatan Saluran Air*	*Kp. Ciakar Desa Cicalengka (Jl. H. Napis gang Masjid)*	Pemenuhan sarana dan prasarana	*258.890.000*	
58	*Pengadaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan Desa*	*Desa Malang Nengah*	Pemenuhan sarana dan prasarana	*100.000.000*	
59	*Peningkatan Sarana Dan Prasarana (Pemagaran)*	*SMPN 3 PAGEDANGAN*	Pemenuhan sarana dan prasarana	*110.000.000*	
60	*Peningkatan Sarana Dan Prasarana (Paving)*	*SMPN 3 PAGEDANGAN*	Pemenuhan sarana dan prasarana	*170.000.000*	
61	*Peningkatan Sarana Dan Prasarana (Ruang Kelas Baru)*	*SMPN 3 PAGEDANGAN*	Pemenuhan sarana dan prasarana	*60.000.000*	
62	*Peningkatan Sarana Dan Prasarana (Sarana Ibadah)*	*SMPN 3 PAGEDANGAN*	Pemenuhan sarana dan prasarana	*30.000.000*	
63	*Pengadaan Taman Baca*	*Desa Malang Nengah*	Pemenuhan sarana dan prasarana	*100.000.000*	
64	*Aplikasi Manajemen Kearsipan Digital Desa*	*Desa Malang Nengah*	Pemenuhan sarana dan prasarana	*10.000.000*	
65	*Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni*	*Desa Malang Nengah*	Pemenuhan sarana dan prasarana	*30.000.000*	
66	*Pemberian Makan Tambahan (PMT) Balita*	*Desa Malang Nengah*	Pemenuhan sarana dan prasarana	*12.000.000*	
67	*Peningkatan Sarana Air Bersih*	*Kp Pabuaran RT 02 RW 02 Desa Malang Nengah*	Pemenuhan sarana dan prasarana	*30.000.000*	
68	*Peningkatan Jalan Hotmix*	*Kp Jaha RT 01 RW 04 Desa Malang Nengah*	Pemenuhan sarana dan prasarana	*200.000.000*	
69	*Peningkatan Jalan Hotmix*	*Kp Jaha RT 02 RW 05 Desa Malang Nengah*	Pemenuhan sarana dan prasarana	*200.000.000*	
70	*Pengadaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan Desa*	*Desa Kadusirung*	Pemenuhan sarana dan prasarana	*100.000.000*	
71	*Peningkatan Sarana dan Prasarana (Rehab)*	*SDN Ciakar Desa Kadusirung*	Pemenuhan sarana dan prasarana	*250.000.000*	
72	*Penerangan Jalanan Umum (PJU)*	*Desa Kadusirung*	Pemenuhan sarana dan prasarana	*200.000.000*	
73	*Pengadaan Taman Baca*	*Desa Kadusirung*	Pemenuhan sarana dan prasarana	*100.000.000*	
74	*Aplikasi Manajemen Kearsipan Digital Desa*	*Desa Kadusirung*	Pemenuhan sarana dan prasarana	*100.000.000*	
75	*Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni*	*Desa Kadusirung*	Pemenuhan sarana dan prasarana	*100.000.000*	
76	*Pemberian Makan Tambahan (PMT) Balita*	*Desa Kadusirung*	Pemenuhan sarana dan prasarana	*100.000.000*	
77	*Budidaya Ayam Kampung*	*Desa Kadusirung*	Pemenuhan sarana dan prasarana	*100.000.000*	
78	*Peningkatan Sarana dan Prasarana (Marka Jalan)*	*Desa Kadusirung*	Pemenuhan sarana dan prasarana	*100.000.000*	
79	*Peningkatan Sarana dan Prasarana (Jembatan Penyebrangan Orang)*	*Kp Ciakar Desa Kadusirung*	Pemenuhan sarana dan prasarana	*500.000.000*	
80	*Pengadaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan Desa*	*Desa Cihuni*	Pemenuhan sarana dan prasarana	*100.000.000*	
81	*Pengadaan Mobil Operasional PKK*	*Desa Cihuni*	Pemenuhan sarana dan prasarana	*250.000.000*	
82	*Pengadaan Taman Baca*	*Desa Cihuni*	Pemenuhan sarana dan prasarana	*100.000.000*	
83	*Aplikasi Manajemen Kearsipan Digital Desa*	*Desa Cihuni*	Pemenuhan sarana dan prasarana	*10.000.000*	
84	*Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni*	*Desa Cihuni*	Pemenuhan sarana dan prasarana	*30.000.000*	
85	*Pemberian Makan Tambahan (PMT) Balita*	*Desa Cihuni*	Pemenuhan sarana dan prasarana	*12.000.000*	
86	*Budidaya Ayam Kampung*	*Desa Cihuni*	Pemenuhan sarana dan prasarana	*100.000.000*	
87	*Pelatihan Kewirausahaan (Sablon)*	*Desa Cihuni*	Pemenuhan sarana dan prasarana	*25.000.000*	
88	*Pengadaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan Desa*	*Desa Pagedangan*	Pemenuhan sarana dan prasarana	*100.000.000*	
89	*Peningkatan Sarana dan Prasarana (Saluran Air)*	*Kp Cicayur I*	Pemenuhan sarana dan prasarana	*500.000.000*	

90	*Pengadaan Taman Baca*	*Desa Pagedangan*	Pemenuhan sarana dan prasarana	*100.000.000*	
91	*Aplikasi Manajemen Kearsipan Digital Desa*	*Desa Pagedangan*	Pemenuhan sarana dan prasarana	*10.000.000*	
92	*Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni*	*Desa Pagedangan*	Pemenuhan sarana dan prasarana	*30.000.000*	
93	*Pemberian Makan Tambahan (PMT) Balita*	*Desa Pagedangan*	Pemenuhan sarana dan prasarana	*12.000.000*	
94	*Budidaya Bebek Pedaging*	*Desa Pagedangan*	Pemenuhan sarana dan prasarana	*100.000.000*	
95	*Pelatihan Kewirausahaan (Sablon)*	*Desa Pagedangan*	Pemenuhan sarana dan prasarana	*25.000.000*	
96	*Pengadaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan Desa*	*Desa Pagedangan*	Pemenuhan sarana dan prasarana	*100.000.000*	
97	*Pembebasan Lahan Stadion Mini*	*Desa Situgadung*	Pemenuhan sarana dan prasarana	*1.000.000.000*	
98	*Peningkatan Sarana Dan Prasarana (Pemagaran)*	*SDN 2 Situgadung*	Pemenuhan sarana dan prasarana	*100.000.000*	
99	*Peningkatan Sarana Dan Prasarana (Hotmix)*	*RT 08 RW 04 SDN 2 Situgadung*	Pemenuhan sarana dan prasarana	*500.000.000*	
100	*Peningkatan Sarana Dan Prasarana (Rehab)*	*SDN 3 Kp Ranca Gede Desa Situgadung*	Pemenuhan sarana dan prasarana	*600.000.000*	
101	*Penerangan Jalan Umum (PJU)*	*Desa Situgadung*	Pemenuhan sarana dan prasarana	*400.000.000*	
102	*Pengadaan/Pemasangan Listrik*	*Posyandu Mawar 4 Desa Situgadung*	Pemenuhan sarana dan prasarana	*5.000.000*	
103	*Pengadaan/Pemasangan Listrik*	*Posyandu Mawar 5 Desa Situgadung*	Pemenuhan sarana dan prasarana	*5.000.000*	
104	*Pengadaan/Pemasangan Listrik*	*Posyandu Mawar 7 Desa Situgadung*	Pemenuhan sarana dan prasarana	*5.000.000*	
105	*Perluasan Wilayah TPU Kilabeng*	*Kp Sinang Palai*	Pemenuhan sarana dan prasarana	*7.500.000.000*	
106	*Aplikasi Manajemen Kearsipan Digital Desa*	*Desa Situgadung*	Pemenuhan sarana dan prasarana	*10.000.000*	
107	*Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni*	*Desa Situgadung*	Pemenuhan sarana dan prasarana	*30.000.000*	
108	*Pemberian Makan Tambahan (PMT) Balita*	*Desa Situgadung*	Pemenuhan sarana dan prasarana	*12.000.000*	
109	*Budidaya Ayam Kampung*	*Desa Situgadung*	Pemenuhan sarana dan prasarana	*100.000.000*	
110	*Peningkatan Jalan Betonisasi*	*RT 02 RW 01 Desa Situgadung*	Pemenuhan sarana dan prasarana	*350.000.000*	
111	*Peningkatan Sarana dan Prasarana(Rehab)*	*SMPN 2 Medang*	Pemenuhan sarana dan prasarana	*150.000.000*	
112	*Gedung Sekretariat PMI*	*Kecamatan Pagedangan*	Pemenuhan sarana dan prasarana	*150.000.000*	
113	*Gedung Sekretariat KNPI*	*Kecamatan Pagedangan*	Pemenuhan sarana dan prasarana	*150.000.000*	

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Rencana kerja Perubahan OPD Kecamatan Pagedangan tersusun dalam program yang merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program tersebut, ditetapkan beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannyaTujuan.

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan kedalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran tujuan, visi dan misi organisasi. Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuntitatif maupun kualitatif. Untuk mengakomodir kebijakan yang disebabkan oleh adanya perubahan tugas pokok dan fungsi OPD Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang, diperlukan penyempurnaan maupun penyesuaian program dan kegiatan di dalam renstra OPD guna memenuhi kebutuhan tersebut.

Rencana Kerja merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu pemerintahan di Kabupaten Tangerang.

Adapun rumusan Indeks Kinerja Utama Tahun 2024-2026 adalah :

No	Tujuan'	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	Meningkatkan kualitas pelayanan publik kecamatan	Meningkatnya pelayanan masyarakat	Meningkatkan Pelayanan (PATEN) Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat Masyarakat Di Kecamatan
			Meningkatkan pembinaan/pemberdayaan kepada kelompok masyarakat dan Pemuda	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
			Meningkatkan kualitas Infrastruktur Wilayah	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Uumum

Berdasarkan Tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Misi 4: Mewujudkan Tata Pemerintahan yang baik, demokratis dan partisipatif;

   Tujuan :

   a) Meningkatkan kualitas pelayanan publik kecamatan;

Sasaran :
Meningkatnya pelayanan masyarakat
Strategi :
a) Meningkatkan Pelayanan (PATEN) Kecamatan;
b) Meningkatkan pembinaan/pemberdayaan kepada kelompok masyarakat dan Pemuda;
c) Meningkatkan kualitas Infrastruktur Wilayah.

Arah Kebijakan :
a) Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat Masyarakat Di Kecamatan;
b) Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
c) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum.

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		KECAMATAN PAGEDANGAN							**17.100.859.166**	**26.964.129.080**	**27.721.071.091**	**10.620.211.925**							**41.155.000.000**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**17.100.859.166**	**26.964.129.080**	**27.721.071.091**	**10.620.211.925**							**41.155.000.000**	
	7.01	**KECAMATAN**							**17.100.859.166**	**26.964.129.080**	**27.721.071.091**	**10.620.211.925**							**41.155.000.000**	
1,	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Kec. Pagedangan**				**100 100 persen Persen**	**100 100 persen Persen**	**11.210.040.566**	**12.439.489.280**	**13.542.814.291**	**2.332.459.434**							**13.542.500.000**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				7 Dokumen	7 Dokumen	201.528.000	161.406.000	126.090.000	-75.438.000			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Pegawai Kecamatan Pagedangan		480.000.000	KECAMATAN PAGEDANGAN
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	7 Dokumen	95.714.000	77.996.000	55.104.000	-40.610.000	Kab. Tangerang, Pagedangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			180.000.000	KECAMATAN PAGEDANGAN
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		

			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	3 Laporan	41.306.000	36.554.000	36.054.000	-5.252.000	Kab. Tangerang, Pagedangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			120.000.000	KECAMATAN PAGEDANGAN
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	4 Laporan	64.508.000	46.856.000	34.932.000	-29.576.000	Kab. Tangerang, Pagedangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			180.000.000	KECAMATAN PAGEDANGAN
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				2 Dokumen	2 Dokumen	7.040.369.166	7.903.653.433	8.726.843.644	1.686.474.478			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Pegawai Kecamatan Pagedangan		7.500.000.000	KECAMATAN PAGEDANGAN
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				35 Orang/bulan	35 Orang/bulan	6.971.859.166	7.843.063.433	8.684.780.644	1.712.921.478	Kab. Tangerang, Pagedangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola			7.350.000.000	KECAMATAN PAGEDANGAN

															dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemerintahan yang Baik				
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				5 Laporan	5 Laporan	68.510.000	60.590.000	42.063.000	-26.447.000	Kab. Tangerang, Pagedangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			150.000.000	KECAMATAN PAGEDANGAN
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Tersedianya Dokumen Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD*				2 Dokumen	2 Dokumen	27.704.000	24.536.000	12.018.000	-15.686.000			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Masyarakat dan Pemangku Kepentingan		60.000.000	KECAMATAN PAGEDANGAN
	7.01.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	27.704.000	24.536.000	12.018.000	-15.686.000	Kab. Tangerang, Pagedangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			60.000.000	KECAMATAN PAGEDANGAN
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Tersedianya Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				1 Dokumen	2 Dokumen	267.730.400	266.531.200	261.075.000	-6.655.400			-	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan	Pegawai ASN Kecamatan Pagedangan		290.000.000	KECAMATAN PAGEDANGAN

															Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik				
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				33 Paket	33 Paket	175.822.000	204.599.000	204.599.000	28.777.000	Kab. Tangerang, Pagedangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			120.000.000	KECAMATAN PAGEDANGAN
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				70 Orang	33 Orang	91.908.400	61.932.200	56.476.000	-35.432.400	Kab. Tangerang, Pagedangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			170.000.000	KECAMATAN PAGEDANGAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Tersedianya Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah*				8 Dokumen	8 Dokumen	496.525.100	541.690.710	765.915.710	269.390.610			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Pegawai Kecamatan Pagedangan		808.000.000	KECAMATAN PAGEDANGAN
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	13.477.500	13.477.500	13.477.500	-	Kab. Tangerang, Pagedangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatk			35.000.000	KECAMATAN PAGEDANGAN

														gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	an Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik				
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	75.000.000	55.314.000	330.314.000	255.314.000	Kab. Tangerang, Pagedangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			250.000.000	KECAMATAN PAGEDANGAN
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	27.056.700	26.048.200	26.048.200	-1.008.500	Kab. Tangerang, Pagedangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			30.000.000	KECAMATAN PAGEDANGAN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	54.810.500	48.141.600	48.141.600	-6.668.900	Kab. Tangerang, Pagedangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			80.000.000	KECAMATAN PAGEDANGAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	

			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	35.838.400	32.727.000	32.727.000	-3.111.400	Kab. Tangerang, Pagedangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			60.000.000	KECAMATAN PAGEDANGAN
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				4 Dokumen	4 Dokumen	14.420.000	73.879.000	73.879.000	59.459.000	Kab. Tangerang, Pagedangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			25.000.000	KECAMATAN PAGEDANGAN
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	75.000.000	91.500.000	73.500.000	-1.500.000	Kab. Tangerang, Pagedangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			110.000.000	KECAMATAN PAGEDANGAN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	40.322.000	39.831.000	7.056.000	-33.266.000	Kab. Tangerang, Pagedangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata			50.000.000	KECAMATAN PAGEDANGAN

														(generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kelola Pemerintahan yang Baik				
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Tersedianya Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				2 Dokumen	2 Dokumen	156.236.300	130.148.600	130.148.600	-26.087.700			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Pegawai Kecamatan Pagedangan		335.000.000	KECAMATAN PAGEDANGAN
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	28.331.100	14.941.500	14.941.500	-13.389.600	Kab. Tangerang, Pagedangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			85.000.000	KECAMATAN PAGEDANGAN
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	127.905.200	115.207.100	115.207.100	-12.698.100	Kab. Tangerang, Pagedangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			250.000.000	KECAMATAN PAGEDANGAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Dokumen Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				3 dokumen	3 Dokumen	2.373.464.600	2.672.076.225	2.781.276.225	407.811.625			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan,	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintaha	Pegawai Kecamatan Pagedangan		3.176.500.000	KECAMATAN PAGEDANGAN

														kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	n yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik				
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	15.825.000	16.530.000	16.530.000	705.000	Kab. Tangerang, Pagedangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			20.000.000	KECAMATAN PAGEDANGAN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	261.351.600	284.023.056	284.023.056	22.671.456	Kab. Tangerang, Pagedangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			350.000.000	KECAMATAN PAGEDANGAN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	967.288.000	946.413.568	1.030.413.568	63.125.568	Kab. Tangerang, Pagedangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			1.300.000.000	KECAMATAN PAGEDANGAN

	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				3 dokumen	4 Dokumen	646.483.000	739.447.112	739.447.112	92.964.112			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Pegawai Kecamatan Pagedangan		893.000.000	KECAMATAN PAGEDANGAN
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	2 Unit	117.382.400	107.149.976	107.149.976	-10.232.424	Kab. Tangerang, Pagedangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			120.000.000	KECAMATAN PAGEDANGAN
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	6 Unit	149.850.600	197.047.136	197.047.136	47.196.536	Kab. Tangerang, Pagedangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			170.000.000	KECAMATAN PAGEDANGAN
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				34 Unit	5 Unit	59.250.000	44.750.000	44.750.000	-14.500.000	Kab. Tangerang, Pagedangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata			80.000.000	KECAMATAN PAGEDANGAN

														(generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kelola Pemerintahan yang Baik				
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	300.000.000	370.000.000	370.000.000	70.000.000	Kab. Tangerang, Pagedangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			500.000.000	KECAMATAN PAGEDANGAN
2,	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Prosentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar Kecamatan Pagedangan Presentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik Kecamatan Pagedangan**				**100 persen**	**89,70 90 persen persen**	**908.794.000**	**9.632.393.000**	**9.682.668.000**	**1.651.206.000**							**2.560.000.000**	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Jumlah Fasilitas umum yang terpelihara dalam kondisi baik/ Jumlah total fasilitas umumkewenangan kecamatan x100 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan tersedianya pemenuhan sarana dan prasarana PATEN di Kecamatan*				89.70 persen 90 persen 92 Persen	89.70 persen 90 persen 92 Persen	58.726.000	51.450.000	39.600.000	-19.126.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Masyarakat dan Pemangku Kepentingan		60.000.000	KECAMATAN PAGEDANGAN
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	58.726.000	51.450.000	39.600.000	-19.126.000	Kab. Tangerang, Pagedangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba,	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatk			60.000.000	KECAMATAN PAGEDANGAN

														judi, dan penyeludupan.	an Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik				
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	*Presentase Infrastruktur Yang Dipelihara Tersedianya Dokumen Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum*				92 persen	1 Dokumen 92 persen	850.068.000	9.580.943.000	9.643.068.000	8.793.000.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Masyarakat dan Pemangku Kepentingan		2.500.000.000	KECAMATAN PAGEDANGAN
	7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum																	
			Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				12 Dokumen	1 Dokumen	850.068.000	9.580.943.000	9.643.068.000	8.793.000.000	Kab. Tangerang, Pagedangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			2.500.000.000	KECAMATAN PAGEDANGAN
3,	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan**				**90 persen**	**90 persen**	**4.355.747.400**	**4.319.470.600**	**4.079.724.600**	**19.676.752.600**							**24.032.500.000**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan/ pemberdayaan*				10 kelompok	10 kelompok	880.245.900	1.122.865.400	1.020.609.400	140.363.500			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Meningkatkan Perekonomian Masyarakat	Masyarakat dan Pemangku Kepentingan		1.620.000.000	KECAMATAN PAGEDANGAN
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan				10 Lembaga Kemasyarakatan	10 Lembaga Kemasyarakatan	65.465.000	65.115.000	65.115.000	-350.000	Kab. Tangerang, Pagedangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Meningkatkan			120.000.000	KECAMATAN PAGEDANGAN

			Pembangunan di Desa												Perekonomian Masyarakat				
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	814.780.900	1.057.750.400	955.494.400	140.713.500	Kab. Tangerang, Pagedangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Meningkatkan Perekonomian Masyarakat			1.500.000.000	KECAMATAN PAGEDANGAN
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	*Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara*				50 Keluarga	50 Keluarga	306.101.500	276.747.500	242.407.500	-63.694.000			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Meningkatkan Perekonomian Masyarakat	Masyarakat dan Pemangku Kepentingan		400.000.000	KECAMATAN PAGEDANGAN
	7.01.03.2.06.0001	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara																	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara				50 Keluarga	50 Keluarga	306.101.500	276.747.500	242.407.500	-63.694.000	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tangerang, Pagedangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Meningkatkan Perekonomian Masyarakat			400.000.000	KECAMATAN PAGEDANGAN
4,	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti**				**80 persen**	**80 persen**	**229.117.800**	**208.679.800**	**142.136.800**	**125.882.200**							**355.000.000**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Tersedianya Dokumen Koordinasi Upaya Penyelenggaraan*				10 Dokumen	10 Dokumen	229.117.800	208.679.800	142.136.800	-86.981.000			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam,	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola	Masyarakat dan Pemangku		355.000.000	KECAMATAN PAGEDANGAN

			Ketenteraman dan Ketertiban Umum											dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Kepentingan			
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																	
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				5 Laporan	5 Laporan	79.117.800	60.119.800	29.216.800	-49.901.000	Kab. Tangerang, Pagedangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			200.000.000	KECAMATAN PAGEDANGAN
5,	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti**				**100 persen**	**100 persen**	**262.529.800**	**228.054.800**	**178.323.800**	**107.470.200**							**370.000.000**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Tersedianya Dokumen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah*				2 Dokumen	2 Dokumen	262.529.800	228.054.800	178.323.800	-84.206.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Masyarakat dan Pemangku Kepentingan		370.000.000	KECAMATAN PAGEDANGAN
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,				50 Orang	50 Orang	188.458.200	155.183.200	132.632.200	-55.826.000	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tangerang, Pagedangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			250.000.000	KECAMATAN PAGEDANGAN

			Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																	
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				4 Dokumen	4 Dokumen	74.071.600	72.871.600	45.691.600	-28.380.000	Kab. Tangerang, Pagedangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			120.000.000	KECAMATAN PAGEDANGAN
6,	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase tertib administrasi pemerintahan desa**				**90 95 persen persen**	**90 persen**	**134.629.600**	**136.041.600**	**95.403.600**	**160.370.400**							**295.000.000**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Tersedianya Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Tersedianya Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*				10 Laporan	10 Laporan 5 Dokumen	134.629.600	136.041.600	95.403.600	-39.226.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Masyarakat dan Pemangku Kepentingan		295.000.000	KECAMATAN PAGEDANGAN
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa																	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				10 Dokumen	1 Dokumen	14.085.400	21.132.400	15.312.400	1.227.000	Kab. Tangerang, Pagedangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			25.000.000	KECAMATAN PAGEDANGAN

	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				10 Dokumen	10 Dokumen	41.960.600	37.658.800	29.010.800	-12.949.800	Kab. Tangerang, Pagedangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			125.000.000	KECAMATAN PAGEDANGAN
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				10 Dokumen	1 Dokumen	27.253.600	26.808.800	18.588.800	-8.664.800	Kab. Tangerang, Pagedangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			60.000.000	KECAMATAN PAGEDANGAN
	7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa																
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa				10 Dokumen	1 Dokumen	23.459.200	23.176.800	14.956.800	-8.502.400	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			40.000.000	KECAMATAN PAGEDANGAN
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa																
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				10 Dokumen	1 Dokumen	27.870.800	27.264.800	17.534.800	-10.336.000	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola			45.000.000	KECAMATAN PAGEDANGAN

															Pemerintahan yang Baik				
		KELURAHAN MEDANG							**17.100.859.166**	**26.964.129.080**	**27.721.071.091**	**10.620.211.925**						**41.155.000.000**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**17.100.859.166**	**26.964.129.080**	**27.721.071.091**	**10.620.211.925**						**41.155.000.000**	
	7.01	**KECAMATAN**							**17.100.859.166**	**26.964.129.080**	**27.721.071.091**	**10.620.211.925**						**41.155.000.000**	
1,	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Kec. Pagedangan**				**100 100 persen Persen**	**100 100 persen Persen**	**11.210.040.566**	**12.439.489.280**	**13.542.814.291**	**2.332.459.434**						**13.542.500.000**	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				8 Dokumen	100 persen	496.525.100	541.690.710	765.915.710	269.390.610			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Pegawai Kelurahan Medang		808.000.000	KECAMATAN PAGEDANGAN
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4.500.000	3.442.500	3.442.500	-1.057.500	Kab. Tangerang, Pagedangan, Medang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			6.500.000	KECAMATAN PAGEDANGAN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	91.500.000	95.802.910	95.802.910	4.302.910	Kab. Tangerang, Pagedangan, Medang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatk			98.500.000	KECAMATAN PAGEDANGAN

														gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	an Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik				
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	25.000.000	21.927.000	21.927.000	-3.073.000	Kab. Tangerang, Pagedangan, Medang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			22.500.000	KECAMATAN PAGEDANGAN
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	39.600.000	39.600.000	39.600.000	-	Kab. Tangerang, Pagedangan, Medang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			40.500.000	KECAMATAN PAGEDANGAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah dokumen Jasa Penunjang Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				3 dokumen	100 persen 3 dokumen	2.373.464.600	2.672.076.225	2.781.276.225	407.811.625			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Pegawai Kelurahan Medang		3.176.500.000	KECAMATAN PAGEDANGAN
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																	

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	14.000.000	24.002.000	24.002.000	10.002.000	Kab. Tangerang, Pagedangan, Medang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			14.500.000	KECAMATAN PAGEDANGAN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	175.000.000	90.545.601	90.545.601	-84.454.399	Kab. Tangerang, Pagedangan, Medang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			92.000.000	KECAMATAN PAGEDANGAN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	940.000.000	1.310.562.000	1.335.762.000	395.762.000	Kab. Tangerang, Pagedangan, Medang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			1.400.000.000	KECAMATAN PAGEDANGAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				-	100 persen	646.483.000	739.447.112	739.447.112	92.964.112			-	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola	Pegawai Kelurahan Medang		893.000.000	KECAMATAN PAGEDANGAN

															Pemerintahan yang Baik				
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	16 Unit	20.000.000	20.500.000	20.500.000	500.000	Kab. Tangerang, Pagedangan, Medang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			23.000.000	KECAMATAN PAGEDANGAN
2,	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan**				**90 persen**	**90 persen**	**4.355.747.400**	**4.319.470.600**	**4.079.724.600**	**19.676.752.600**							**24.032.500.000**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Terlaksananya Program Masyarakat Desa dan Kelurahan*				100 persen	100 persen	3.169.400.000	2.919.857.700	2.816.707.700	-352.692.300			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Meningkatkan Perekonomian Masyarakat	Masyarakat dan Pemangku Kepentingan		22.012.500.000	KECAMATAN PAGEDANGAN
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	19.400.000	11.528.000	11.528.000	-7.872.000	Kab. Tangerang, Pagedangan, Semua Kel/Desa Kab. Tangerang, Pagedangan, Medang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Meningkatkan Perekonomian Masyarakat			12.500.000	KECAMATAN PAGEDANGAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				9 Unit	9 Unit	2.550.000.000	1.924.811.100	1.924.811.100	-625.188.900	Kab. Tangerang, Pagedangan, Medang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Meningkatkan Perekonomian Masyarakat			22.000.000.000	KECAMATAN PAGEDANGAN

	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	600.000.000	983.518.600	880.368.600	280.368.600	Kab. Tangerang, Pagedangan, Medang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Meningkatkan Perekonomian Masyarakat			-	KECAMATAN PAGEDANGAN
3,	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti**				**80 persen**	**80 persen**	**229.117.800**	**208.679.800**	**142.136.800**	**125.882.200**							**355.000.000**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah Dokumen Gangguan Trantibum Terlaksananya Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum*				10 Dokumen	100 persen 10 Dokumen	229.117.800	208.679.800	142.136.800	-86.981.000			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Masyarakat dan Pemangku Kepentingan		355.000.000	KECAMATAN PAGEDANGAN
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																	
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	150.000.000	148.560.000	112.920.000	-37.080.000	Kab. Tangerang, Pagedangan, Medang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			155.000.000	KECAMATAN PAGEDANGAN
	JUMLAH								**17.100.859.166**	**26.964.129.080**	**27.721.071.091**	**10.620.211.925**							**41.155.000.000**	

Anggaran yang mengalami penurunan dikarenakan adanya efisiensi anggaran guna mendukung program prioritas yang telah ditetapkan oleh pemangku kebijakan.

Adapun anggaran yang mengalami penurunan diantaranya sebagai berikut :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dikarenakan efisiensi anggaran
2. Kegiatan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD dikarenakan efisiensi anggaran
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dikarenakan efisiensi anggaran
4. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dikarenakan efisiensi anggaran
5. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah dikarenakan efisiensi anggaran
6. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dikarenakan efisiensi anggaran

Terlepas daripada itu ada juga beberapa kegiatan yang mengalami kenaikan dikarenakan penyesuaian kebutuhan serta pokok pikiran aspirasi masyrakat.

Adapun anggaran yang mengalami kenaikan diantaranya sebagai berikut :

1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dikarenakan penyesuaian kebutuhan belanja pegawai
2. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dikarenakan penyesuaian kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor
3. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dikarenakan penyesuaian kebutuhan dalam belanja honorarium RT/RW pada Kelurahan
4. Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum dikarenakan penyesuaian kebutuhan dalam peningkatan infrastruktur serta menampung aspirasi dari Masyarakat
5. Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan dikarenakan penyesuaian dalam kebutuhan untuk Masyarakat yang diberdayakan

Selain daripada anggaran yang mengalami kenaikan dan penurunan, terdapat kegiatan yang mengalami perubahan target indicator.

Adapun kegiatan yang mengalami perubahan target indicator diantaranya sebagai berikut :

1. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, walaupun kegiatan ini mengalami penurunan (efisiensi) anggaran namun target indikacator meningkat karena dalam Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah terdapat 2 Sub Kegiatan sehingga target indicator yang semula 1 Dokumen menjadi 2 Dokumen.

BAB IV
PENUTUP

a) Catatan Penting

Dengan memperhatikan kondisi dan situasi, tantangan, peluang, hambatan, dan kekuatan yang dimiliki, maka pada Tahun 2025 diperkirakan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Tangerang masih akan mengalami kehidupan yang dinamis dikarenakan merupakan pasca tahun politik baik di tingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten. Situasi yang dinamis tersebut memberikan kesempatan yang lebih luas bagi Kecamatan Pagedangan untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Renja Perubahan Kecamatan Pagedangan Tahun 2025 yang telah tersusun akan memberikan arah dan pedoman bagi semua pemangku kepentingan di Kecamatan Pagedangan itu sendiri maupun pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan Kecamatan Pagedangan dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah direncanakan. Renja Kecamatan Pagedangan Tahun 2025 yang telah disusun berdasarkan Indikasi Program Strategis Tahun 2024-2026 Perencanaan Kabupaten Tangerang sekiranya dapat benar-benar dilaksanakan secara konsisten terutama dalam pemenuhan anggaran pada proses pengangaran di APBD Tahun Anggaran 2025.

Anggaran yang mengalami penurunan dikarenakan adanya efisiensi anggaran guna mendukung program prioritas yang telah ditetapkan oleh pemangku kebijakan.

Adapun anggaran yang mengalami penurunan diantaranya sebagai berikut :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dikarenakan efisiensi anggaran
2. Kegiatan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD dikarenakan efisiensi anggaran
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dikarenakan efisiensi anggaran
4. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dikarenakan efisiensi anggaran
5. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah dikarenakan efisiensi anggaran
6. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dikarenakan efisiensi anggaran

Terlepas daripada itu ada juga beberapa kegiatan yang mengalami kenaikan dikarenakan penyesuaian kebutuhan serta pokok pikiran aspirasi masyrakat.

Adapun anggaran yang mengalami kenaikan diantaranya sebagai berikut :

1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dikarenakan penyesuaian kebutuhan belanja pegawai
2. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dikarenakan penyesuaian kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor
3. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dikarenakan penyesuaian kebutuhan dalam belanja honorarium RT/RW pada Kelurahan

4. Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum dikarenakan penyesuaian kebutuhan dalam peningkatan infrastruktur serta menampung aspirasi dari Masyarakat
5. Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan dikarenakan penyesuaian dalam kebutuhan untuk Masyarakat yang diberdayakan

Selain daripada anggaran yang mengalami kenaikan dan penurunan, terdapat kegiatan yang mengalami perubahan target indicator.

Adapun kegiatan yang mengalami perubahan target indicator diantaranya sebagai berikut :

2. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, walaupun kegiatan ini mengalami penurunan (efisiensi) anggaran namun target indikacator meningkat karena dalam Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah terdapat 2 Sub Kegiatan sehingga target indicator yang semula 1 Dokumen menjadi 2 Dokumen.

b) Kaidah – Kaidah Pelaksanaan

Dalam Renja Perubahan Tahun Anggaran 2025 Kecamatan Pagedangan mendapat alokasi anggaran untuk Belanja Program sebesar Rp 27.721.071.091,- yang terdiri dari 6 program antara lain program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota, program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum, program program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, dan program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.

c) Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut terhadap Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 antara lain :

1. Dalam melaksanakan pekerjaannya diharapkan semua pegawai saling mendukung dan mengerti yang menjadi tupoksinya.
2. Agar dapat mengoptimalkan anggaran yang tersedia dalam pencapaian target sasaran dan tujuan organisasi.

Selanjutnya, dengan ditetapkannya Rencana Kerja Tahun 2025, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dijabarkan ke dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA P) Kecamatan Pagedangan Tahun Anggaran 2025.

49. Kecamatan Jambe

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Kecamatan Jambe Tahun 2025 ini disusun mengacu kepada visi, misi, arah kebijakan umum, strategi, prioritas, program dan kegiatan pembangunan Tahun 2025 Kabupaten Tangerang, yang tertuang pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 Kabupaten Tangerang.

Selain itu Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 Kecamatan Jambe mengikuti arahan Surat Edaran Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 tentang Efisiensi Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 dan merupakan rencana kerja tahunan sebagai dokumen perencanaan operasional tahunan, dengan memperhatikan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang partisipatif, menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan yang diaktualisasikan dalam pelaksanaan pembangunan satu tahun berjalan, dimana pembangunan itu sendiri merupakan suatu proses yang terus menerus dilakukan dengan terencana untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan dan kehidupan masyarakat.

Rencana Kerja Perubahan ini juga merupakan jembatan untuk menuju Renstra 2025-2029 dan mengarah kepada upaya untuk memaksimalkan kapastitas aparatur, sumberdaya manusia, sumber daya alam, teknologi, dan biaya serta pembangunan dalam pelaksanaannya perlu mempertimbangkan keseimbangan antara kebutuhan nyata dengan kemampuan anggaran yang dimiliki daerah, sehingga dalam kondisi seperti ini maka perencanaan pembangunan harus ditata secara bertahap dan berkelanjutan serta dilakukan lebih selektif dengan melihat prioritas-prioritas masalah yang perlu segera ditanggulangi bersifat penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan dalam tahun yang bersangkutan.

1.1.1.Visi

Keberhasilan pembangunan di Kecamatan Jambe Kabupaten Tangerang merupakan bagian integral dari keberhasilan pencapaian visi Kabupaten Tangerang. Oleh karena itu, sangat perlu dilakukan pemaduserasian, penyelarasan, pengintegrasian dan sinergitas perencanaan dan pelaksanaan rencana pembangunan Kecamatan Jambe dengan Rencana Pembangunan Kabupaten Tangerang. Penyelasaran dimaksud antara lain dalam penetapan prioritas pembangunan, sasaran, rencana program dan kegiatan pembangunan dengan tetap memperhatikan kondisi dan potensi Kecamatan dan Desa.

Mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Jambe Kabupaten Tangerang Tahun 2024–2026 Visi dan Misi Kecamatan Jambe yang tertuang pada Renstra Tahun 2024-2026.

Visi yang ditetapkan mencerminkan gambaran peran dan kondisi yang ingin diwujudkan oleh Kecamatan Jambe di masa depan. Berdasarkan makna tersebut dan sesuai dengan Visi Pemerintah Kabupaten Tangerang Tahun 2024 – 2026, maka visi Kecamatan Jambe Kabupaten Tangerang Tahun 2024 adalah :

“Kabupaten Tangerang Berdaya Saing Menuju Masyarakat Madani”

Diharapkan dengan terumuskannya visi Kecamatan Jambe Kabupaten Tangerang, maka dapat menjadi pedoman bagi seluruh unit kerja internal Kecamatan untuk mewujudkannya. Atas dasar pertimbangan tersebut, selanjutnya misi yang disusun sebagai pedoman bagi pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja internal di Kecamatan Jambe Kabupaten Tangerang.

1.1.2.Misi

Untuk mewujudkan Visi Kabupaten Tangerang tersebut, maka disusun misi dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis internal dan eksternal. Rumusan Misi yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

1) Mewujudkan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Tangerang yang mandiri, berdaya saing tinggi dan berakhlak mulia;
2) Mewujudkan perekonomian daerah yang maju dan berdaya saing berbasis pada potensi keunggulan lokal;
3) Mewujudkan pelayanan dasar bagi masyarakat secara merata dan proporsional;
4) Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, demokratis dan partisipatif; dan
5) Mewujudkan pembangunan yang terpadu dan serasi dengan pendekatan pengembangan wilayah berbasis ekonomi dan ekologi.

1.2 LANDASAN HUKUM

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja Perubahan Kecamatan Jambe Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 184, Tambahan Lembar Negara republik Indonesia Nomor 2000 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
b. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
c. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
e. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
g. Peraturan Pemerintah Nommor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
i. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Mencabut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011);
l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
o. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
p. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang;
q. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang Tahun 2011-2031
r. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 33 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan Dan Keluarahan;
s. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

Maksud Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Perubahan Kecamatan Jambe Tahun 2025 digunakan sebagai dasar dan acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kewilayahan yaitu Kecamatan Jambe dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 1 (satu) tahun sehingga maksud penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Jambe adalah:

1. Mengevaluasi kinerja pembangunan dan penganggaran 2025 serta menganalisa prospek pembangunan dan penganggaran tahun 2025.
2. Mengarahkan visi Kecamatan Jame kedalam suatu strategi pembangunan yang akan dilaksanakan tahun 2025.
3. Menyusun kebijakan pembangunan Kecamatan Jambe yang dituangkan kedalam susunan program dan indikasi kegiatan tahun 2025.
4. Menyusun anggaran sesuai dengan Surat Edaran Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 tentang Efisiensi Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.

1.3.2. Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Peubahan Kecamatan Jambe Tahun 2025 merupakan penjabaran Rencana Strategi (Renstra) Kecamatan Jambe Tahun 2024-2026 kedalam dokumen rencana tahunan, adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah:

1. Mencari dan menyusun kajian dari hasil evaluasi kinerja dan membuat suatu kebijakan yang mengarah untuk peningkatan pada aspek indikator kinerja yang dianggap kurang dan tidak tercapai pada pencapaian kinerja sehingga dijadikan kerangka pembangunan dan penganggaran perubahan Kecamatan Jambe Tahun 2025.
2. Dapat menentukan sasaran dan strategis yang sesuai dengan visi dan misi Kecamatan dalam menentukan Indikasi dan kegiatan pembangunan Kecamatan Jambe tahun 2025.
3. Tersusunnya program dan kegiatan yang selaras dengan tugas pokok dan fungsi berupa kebijakan yang disesuaikan dengan ruang lingkup kewilayahan.
4. Tersusunnya penganggaran yang berpedoman pada aspek efektif dan efisien dalam menentukan program dan kegiatan yang berkenaan dengan bidang dan urusan.
5. Menyesuaikan anggaran efisiensi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Jambe tahun 2025 adalah:

BAB I : PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025
- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Jambe Tahun 2025
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Jambe
- 2.3 Isu-Isu Penyelenggara Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

B A B I I I : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV : PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Jambe Tahun 2024

Kecamatan Jambe pada tahun anggaran 2024 memiliki pagu anggaran sebesar **Rp.15.371.775.973,00** dan telah terserap sebesar **Rp.15.113.614.192,00.** Kondisi ini menghasilkan sisa anggaran Pemerintah Kecamatan Jambe Kabupaten Tangerang sebesar **Rp.258.161.781,00** atau **1,68%**, dengan penyerapan anggaran sebsesar **98,32%.**

PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BERDASAR TRANSAKSI
TAHUN ANGGARAN 2024
PERIODE : 1 JANUARI 2024 S/D 31 DESEMBER 2024

SATKER : 7.01.0.00.0.00.18.0000 KECAMATAN JAMBE

No	Uraian	Pagu Anggaran	Jumlah Realisasi (Rp.)			Lebih / (Kurang)	
			S/D Periode Lalu	Periode Ini	Total	(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 3	8
5	**BELANJA DAERAH**						
5.1	**BELANJA OPERASI**	9.314.930.485,00	0,00	9.077.936.801,00	9.077.936.801,00	(236.993.684,00)	97,46
5.1.01	Belanja Pegawai	5.153.375.961,00	0,00	5.113.055.568,00	5.113.055.568,00	(40.320.393,00)	99,22
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.161.554.524,00	0,00	3.964.881.233,00	3.964.881.233,00	(196.673.291,00)	95,27
5.2	**BELANJA MODAL**	6.056.845.488,00	0,00	6.035.677.391,00	6.035.677.391,00	(21.168.097,00)	99,65
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	379.359.812,00	0,00	372.370.000,00	372.370.000,00	(6.989.812,00)	98,16
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	100.000.330,00	0,00	99.765.000,00	99.765.000,00	(235.330,00)	99,76
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.549.325.346,00	0,00	5.535.502.391,00	5.535.502.391,00	(13.822.955,00)	99,75
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	28.160.000,00	0,00	28.040.000,00	28.040.000,00	(120.000,00)	99,57
	JUMLAH BELANJA DAERAH	15.371.775.973,00	0,00	15.113.614.192,00	15.113.614.192,00	(258.161.781,00)	98,32
	SURPLUS / (DEFISIT)	(15.371.775.973,00)	0,00	(15.113.614.192,00)	(15.113.614.192,00)	258.161.781,00	98,32
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(15.371.775.973,00)	0,00	(15.113.614.192,00)	(15.113.614.192,00)	258.161.781,00	98,32

Adanya sisa anggaran tersebut dikarenakan adanya efisiensi dari berbagai kegiatan yang tidak semua terserap, antara lain pada belanja pegawai yang di Tahun 2024 jumlah pegawai berkurang dikarenakan mutasi/perpindahan pegawai, meninggal dunia dan masa jabatan berakhir (pensiun), dan pada belanja modal adanya penawaran harga/kontrak sehingga terjadi efesiensi.

Secara keseluruhan pada tahun anggaran 2025, untuk anggaran murni hasil efisiensi Kecamatan Jambe mendapatkan anggaran sebesar **Rp. 16.228.643.002,00** ***(Enam Belas Milyar Dua Ratus Dua Puluh Delapan Juta Enam Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Dua Rupiah)*** Dari Total Anggaran tersebut **sampai dengan triwulan 1 ini**, sudah terealisasi sebesar **Rp.4.637.710.358,00** ***(Empat Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Sepuluh Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah)*** atau mencapai **28,58%**. Belum terserapnya keseluruhan Anggaran di Kecamatan Jambe dikarenakan pelaksanaan kegiatan baru sampai dengan triwulan ke 1 dan sedang berjalan di triwulan II.

Berikut akan disajikan Tabel Review Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Jambe tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra Kecamatan Jambe, yang bertujuan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan PD dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra SKPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Review didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya dan perkiraan pelaksanaan DPA Kecamatan Jambe tahun berjalan (tahun 2025). Adapun gambaran selengkapnya tentang evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Jambe tahun 2025 sampai dengan triwulan I disajikan sebagaimana tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1
Realisasi Anggaran Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I Kecamatan Jambe

Kode	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Formulasi			Satuan	Target Tahunan	Target	Realisasi	Capaian	Analisa		PENANGGUNG JAWAB
			Anggaran	Realisasi Anggaran s/d Triwulan I	Capaian (%)			TW 1	TW 1	TW 1	Hambatan/ Dukungan	Solusi/ Catatan	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan**	**8,029,480,789**	**2,260,828,258**	**28%**	**Persen**	**90**	**25**	**25**	**100%**			
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	219,318,900	104,902,000	48%	Dokumen	6	3	3	100%			Kasubag Perencanaan dan Keuangan
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	127,119,900	57,935,000	46%	Dokumen	4	1	1	100%			Kasubag Perencanaan dan Keuangan
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	38,027,000	18,817,000	49%	Laporan	2	1	1	100%			Kasubag Perencanaan dan Keuangan

Kode	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Formulasi			Satuan	Target Tahunan	Target	Realisasi	Capaian	Analisa		PENANGGUNG JAWAB
			Anggaran	Realisasi Anggaran s/d Triwulan I	Capaian (%)			TW 1	TW 1	TW 1	Hambatan/ Dukungan	Solusi/ Catatan	
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	54,172,000	28,150,000	52%	Laporan	6	1	1	100%			Kasubag Perencanaan dan Keuangan
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan	5,660,298,713	1,487,537,837	26%	Dokumen	2	2	2	100%			Kasubag Perencanaan dan Keuangan
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	5,612,007,713	1,485,712,837	26%	Orang/Bulan	25	25	24	96%	Untuk Realisasi Gaji Pegawai masih belum maksimal dikarenakan pegawai hanya 24 orang		Kasubag Perencanaan dan Keuangan
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKP	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	48,291,000	1,825,000	4%	Laporan	12	3	3	100%			Kasubag Perencanaan dan Keuangan
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pembinaan Pegawai	-	-		Dokumen	-	-	-				Kasubag Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	-		Paket	-	-	-				Kasubag Umum dan Kepegawaian

Kode	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Formulasi			Satuan	Target Tahunan	Target	Realisasi	Capaian	Analisa		PENANGGUNG JAWAB
			Anggaran	Realisasi Anggaran s/d Triwulan I	Capaian (%)			TW 1	TW 1	TW 1	Hambatan/ Dukungan	Solusi/ Catatan	
7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	-		Orang	-	-	-				Kasubag Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	260,428,540	145,608,000	56%	Dokumen	6	5	5	100%			Kasubag Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20,405,000	-	0%	Paket	5	-	-				Kasubag Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	58,816,340	51,480,000	88%	Paket	13	5	5	100%			Kasubag Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-	-		Paket	-	-	-				Kasubag Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	42,710,800	42,483,000	99%	Paket	27	27	27	100%			Kasubag Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	48,861,000	39,225,000	80%	Paket	5	5	5	100%			Kasubag Umum dan Kepegawaian

Kode	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Formulasi			Satuan	Target Tahunan	Target	Realisasi	Capaian	Analisa		PENANGGUNG JAWAB
			Anggaran	Realisasi Anggaran s/d Triwulan I	Capaian (%)			TW 1	TW 1	TW 1	Hambatan/ Dukungan	Solusi/ Catatan	
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3,395,400	-	0%	Dokumen	7	-	-				Kasubag Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	42,672,000	12,420,000	29%	Laporan	12	3	3	100%			Kasubag Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	43,568,000	-	0%	Laporan	12	2	2	100%			Kasubag Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Jasa Penunjang	1,315,134,676	282,214,181	21%	Jenis	3	1	1	100%			Kasubag Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9,972,000	2,493,000	25%	Laporan	12	3	3	100%			Kasubag Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	297,465,108	35,310,681	12%	Laporan	12	3	3	100%			Kasubag Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1,007,697,568	244,410,500	24%	Laporan	12	3	3	100%			Kasubag Umum dan Kepegawaian

Kode	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Formulasi			Satuan	Target Tahunan	Target	Realisasi	Capaian	Analisa		PENANGGUNG JAWAB
			Anggaran	Realisasi Anggaran s/d Triwulan I	Capaian (%)			TW 1	TW 1	TW 1	Hambatan/ Dukungan	Solusi/ Catatan	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah\ Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	574,299,960	240,566,240	42%	Dokumen	3	1	1	100%			Kasubag Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	271,389,960	111,136,240	41%	unit	10	10	10	100%			Kasubag Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	19,950,000	11,850,000	59%	unit	13	6	6	100%			Kasubag Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	282,960,000	117,580,000	42%	unit	4	1	1	100%			Kasubag Umum dan Kepegawaian
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		**6,422,309,763**	**1,716,974,800**	**27%**	**Persen**	**89,50**	25	25	**100%**			
		Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar	**26,536,550**	**20,430,000**	**77%**	**Persen**	**89,50**	**25**	**25**	**100%**			**Kasi Pelayanan**

Kode	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Formulasi			Satuan	Target Tahunan	Target	Realisasi	Capaian	Analisa		PENANGGUNG JAWAB
			Anggaran	Realisasi Anggaran s/d Triwulan I	Capaian (%)			TW 1	TW 1	TW 1	Hambatan/ Dukungan	Solusi/ Catatan	
		Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara	**6,395,773,213**	**1,696,544,800**	**27%**	**Persen**	**90**	25	25	**100%**			**Kasi Pelayanan**
7.01.02.2.02	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana Paten di Kecamatan	26,536,550	20,430,000	77%	jenis	2	1	1	100%			Kasi Pelayanan
7.01.02.2.02.0003	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	26,536,550	20,430,000	77%	Laporan	2	1	1	100%			Kasi Pelayanan
7.01.02.2.03	Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase infrastruktur yang dipelihara	6,395,773,213	1,696,544,800	27%	Persen	5	1	1	100%			Kasi Pelayanan

Kode	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Formulasi			Satuan	Target Tahunan	Target	Realisasi	Capaian	Analisa		PENANGGUNG JAWAB
			Anggaran	Realisasi Anggaran s/d Triwulan I	Capaian (%)			TW 1	TW 1	TW 1	Hambatan/ Dukungan	Solusi/ Catatan	
7.01.02.2.03.0001	Sub kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	6,395,773,213	1,696,544,800	27%	Dokumen	5	1	1	100%			Kasi Pelayanan
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan /pemberdayaan**	**1,356,344,030**	**593,642,800**	**44%**	**Persen**	**92**	**25**	**25**	**100%**			Kasi Pemberdayaan Masyarakat
7.01.03.2.01	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan/pemberdayaan	1,213,519,330	586,572,800	48%	kelompok	10	10	10	100%			Kasi Pemberdayaan Masyarakat
7.01.03.2.01.0001	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	56,212,230	49,007,800	87%	lembaga	10	10	10	100%			Kasi Pemberdayaan Masyarakat

Kode	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Formulasi			Satuan	Target Tahunan	Target	Realisasi	Capaian	Analisa		PENANGGUNG JAWAB
			Anggaran	Realisasi Anggaran s/d Triwulan I	Capaian (%)			TW 1	TW 1	TW 1	Hambatan/ Dukungan	Solusi/ Catatan	
7.01.03.2.01.0003	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1,157,307,100	537,565,000	46%	laporan	10	4	4	100%			Kasi Pemberdayaan Masyarakat
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	142,824,700	7,070,000	5%	Laporan	10	10	10	100%			Kasi Pemberdayaan Masyarakat
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Meningkatnya kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan Kec. Jambe	142,824,700	7,070,000	5%	laporan	10	1	1	100%			Kasi Pemberdayaan Masyarakat
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti**	**83,656,000**	**25,984,000**	**31%**	**Persen**	**100**	25	25	**100%**			Kasi Trantibum
7.01.04.2.01	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	83,656,000	25,984,000	31%	Persen	8	2	2	100%			Kasi Trantibum

Kode	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Formulasi			Satuan	Target Tahunan	Target	Realisasi	Capaian	Analisa		PENANGGUNG JAWAB
			Anggaran	Realisasi Anggaran s/d Triwulan I	Capaian (%)			TW 1	TW 1	TW 1	Hambatan/ Dukungan	Solusi/ Catatan	
7.01.04.2.01.0001	Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	83,656,000	25,984,000	31%	Laporan	8	2	2	100%			Kasi Trantibum
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Desa Dengan Laporan Administrasi baik**	**79,497,000**	**7,347,500**	**9%**	**Persen**	**85,89**	**25**	**25**	**100%**			**Kasi Binwas Pemdes**
7.01.06.2.01	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa dengan laporan keuangan baik	79,497,000	7,347,500	9%	Dokumen	10	10	10	100%			Kasi Binwas Pemdes
7.01.06.2.01.0002	Sub kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	41,596,000	7,347,500	18%	Dokumen	10	3	3	100%			Kasi Binwas Pemdes
7.01.06.2.01.0017	Sub Kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan	37,901,000	-	0%	Laporan	10	-	-				Kasi Binwas Pemdes

Kode	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Formulasi			Satuan	Target Tahunan	Target	Realisasi	Capaian	Analisa		PENANGGUNG JAWAB
			Anggaran	Realisasi Anggaran s/d Triwulan I	Capaian (%)			TW 1	TW 1	TW 1	Hambatan/ Dukungan	Solusi/ Catatan	
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti**	**257,355,420**	**32,933,000**	**13%**	**Persen**	**100**	**25**	**25**	**100%**			**Kasi Pemerintahan Umum**
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	jumlah rekomendasi yang dikeluarkan	257,355,420	32,933,000	13%	**Persen**	3	**2**	**2**	100%			Kasi Pemerintahan Umum
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	161,884,000	-	0%	Orang	50	0	0				Kasi Pemerintahan Umum

Kode	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Formulasi			Satuan	Target Tahunan	Target	Realisasi	Capaian	Analisa		PENANGGUNG JAWAB
			Anggaran	Realisasi Anggaran s/d Triwulan I	Capaian (%)			TW 1	TW 1	TW 1	Hambatan/ Dukungan	Solusi/ Catatan	
7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	53,901,000	14,259,000	26%	Orang	50	15	15	100%			Kasi Pemerintahan Umum
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	41,570,420	18,674,000	45%	Dokumen	10	3	3	100%			Kasi Pemerintahan Umum

Berdasarkan tabel 2.1 di atas, berikut analisis dari tabel tersebut :

a. Realisasi yang telah memenuhi target kinerja :
    1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota selain kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN terserap dengan baik dan sesuai anggaran kas.
    2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik seluruh kegiatan telah terserap dengan baik.
    3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, seluruh kegiatan telah terserap dengan baik.
    4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum, seluruh kegiatan terserap dengan baik dan sesuai anggaran kas.
    5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa sudah mencapai target kinerja 10 desa yang dilakukan pengawasan dan pembinaan.
    6. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum telah berjalan dengan baik.

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Kecamatan Jambe Tahun sebelumnya dan tahun berjalan 2025, untuk lebih detailnya dapat dilihat pada tabel 2.2 dibawah ini :

Tabel 2.2 (T-C.29)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 Kabupaten Tangerang

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					2023					
				2022	Target Kinerja Renja PD Tahun (n-2) 2023	Realisasi Kinerja Renja PD Tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan**	**90%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100.00%**	**90%**	**25%**	**28%**
7.01.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	6	4	4	4	100%	4	3	50%
7.01.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan	2	2	2	2	100%	2	2	100%

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					2023					
				2022	Target Kinerja Renja PD Tahun (n-2) 2023	Realisasi Kinerja Renja PD Tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
7.01.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pembinaan Pegawai	-	-	-	-	100%	-	-	
7.01.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	6	7	7	7	100%	7	5	83%
7.01.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Jasa Penunjang	3	3	3	3	100%	3	1	33%
7.01.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3	4	4	4	100%	4	1	33%

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					2023					
				2022	Target Kinerja Renja PD Tahun (n-2) 2023	Realisasi Kinerja Renja PD Tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar**	**89.50%**	**95.00%**	**97.00%**	**97.00%**	**100.00%**	**100.00%**	**25.00%**	**28%**
		Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara	**90.00%**	**90.00%**	**92.00%**	**92.00%**	**100.00%**	**93.00%**	**23.50%**	**26%**
7.01.02.2.02	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Di Kecamatan	Tersedianya pemenuhan sarana dan prasarana Paten di Kecamatan	2	2	2	2	100%	3	1	50%
7.01.02.2.03	Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan	Persentase infrastruktur yang dipelihara	90%	95%	97%	97%	100%	100%	25%	28%

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					2023					
				2022	Target Kinerja Renja PD Tahun (n-2) 2023	Realisasi Kinerja Renja PD Tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	Sarana Pelayanan Umum									
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan**	**92.00%**	**14.29%**	**14.29%**	**14.29%**	**100.00%**	**28.57%**	**25.00%**	**27%**
7.01.03.2.01	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan/pemberdayaan	10	10	10	10	100%	10	10	100%
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	10	10	10	10	100%	10	10	100%

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					2023					
				2022	Target Kinerja Renja PD Tahun (n-2) 2023	Realisasi Kinerja Renja PD Tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti**	**100.00%**	**100.00%**	**100%**	**100%**	**100.00%**	**100.00%**	**25.00%**	**25%**
7.01.04.2.01	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	8	5	7	7	100%	8	2	25%
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Presentase Desa Dengan Laporan Administrasi baik**	**100.00%**	**100.00%**	**100%**	**100%**	**100.00%**	**100.00%**	**25.00%**	**25%**
5.1.01.01	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan	Jumlah desa dengan laporan keuangan baik	10	10	10	10	100%	10	10	100%

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					2023					
				2022	Target Kinerja Renja PD Tahun (n-2) 2023	Realisasi Kinerja Renja PD Tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	Pemerintahan Desa Sub Kegiatan									
7.1.6.01	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti**	**100%**	**-**	**-**	**-**		**100%**	**25%**	**25%**
7.1.6.01.2.09	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	jumlah rekomendasi yang dikeluarkan	3	0	0	0		2	2	67%

Berdasarkan tabel 2.2 (TC.29) di atas, realisasi pada triwulan I tahun 2025 telah memenuhi target kinerja, berikut analisis dari tabel tersebut :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, capaian kinerja tercapai keseluruhan, meski ada beberapa yang belum bisa dilaksanakan.
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, capaian kinerja tercapai semua kegiatan terserap dengan baik dan berjalan semua.
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, capaian kinerja tercapai semua kegiatan terserap dengan baik dan berjalan semua.
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, capaian kinerja tercapai semua kegiatan terserap dengan baik dan berjalan semua.
5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, capaian kinerja tercapai semua kegiatan terserap dengan baik dan berjalan semua.
6. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat, capaian kinerja tercapai semua kegiatan terserap dengan baik dan berjalan semua.
7. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, capaian kinerja tercapai semua kegiatan terserap dengan baik dan berjalan semua.
8. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, capaian kinerja tercapai semua kegiatan terserap dengan baik dan berjalan semua.
9. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Sub Kegiatan, capaian kinerja tercapai semua kegiatan terserap dengan baik dan berjalan semua.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Jambe

Perangkat Daerah Kecamatan Jambe Kabupaten Tangerang, merupakan Lembaga Teknis Daerah sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah dalam perencanaan pembangunan. Pencanangan pembangunan yang berkualitas dan professional dapat menjadi wahana untuk memperbaiki pola pembangunan di tingkat daerah, sehingga daerah dapat berkiprah dengan leluasa untuk membangun daerahnya sesuai potensi dan kemampuan yang ada (potensi lokal).

Perangkat Daerah Kecamatan Jambe yang berfungsi sebagai Perangkat Daerah Koordinatif dan Pelayanan masyarakat mempunyai tujuan utamanya adalah untuk kepuasan pelayanan masyarakat secara umum, capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Jambe dapat dicapai bila Indeks Kepuasan Masyarakat tercapai sesuai dengan target. Untuk mendapatkan kepuasan Masyarakat dengan Indeks Kepuasan Masyarakat yang tinggi perlu adanya Standar Pelayanan Minimal (SPM) karena SPM merupakan tolok ukur bagi aparatur dalam memberikan pelayanan kepada Masyarakat, Kepuasan Masyarakat yang menjadi indicator standar pelayanan tetap dikontrol dengan dilakukan review Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) setiap triwulan untuk dicarikan Solusi dari permasalahan yang ada.

Adapun beberapa hal yang perlu dilakukan untuk keberhasilan dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, antara lain :

1. Memberikan pelatihan bagi pegawai di depan meja pelayanan agar sesuai dengan SOP pelayanan.
2. Meningkatkan sistem pelayanan di kecamatan Jambe dengan cara berkoordinasi dengan Dinas terkait.
3. Meningkatkan kualitas ruang pelayanan untuk meningkatkan kenyamanan dan kebersihan ruang pelayanan.

4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam memberikan survey kepuasan masyarakat
5. Meningkatkan inovasi pelayanan yang berorentasi kepada masyarakat untuk memudahkan sistem pelayanan terpadu.

Pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Jambe dapat dilihat sebagaimana Tabel 2.3 berikut :

Tabel 2.3 (T-C.30)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Jambe Kabupaten Tangerang

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	80	85	86	86.5	85.5	86.25	86.5	86.6	Telah sesuai target dan melebihi capaian target Renstra PD
2	Nilai AKIP Kecamatan Jambe	Nilai AKIP	Hasil Nilai AKIP	75.05	79.05	82.25	75	69	74.65	75	75.5	Di Tahun 2023 mengalami penurunan nilai dikarenakan adanya kebijakan baru penilaian dari tim Inspektorat
3	Presentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Presentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Hasil Presentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	65	70	-	-	70	-	-	-	Telah sesuai target namun di Tahun 2024 sudah tidak menjadi standar indikator kinerja utama kecamatan

2.3 Isu-Isu Penyelenggaraaan Tugas dan Fungsi SKPD

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu penyelenggaraan tugas dan fungsi yang ada di Kecamatan Jambe antara lain sebagai berikut:

1. Masih banyaknya tingkat stunting dan keluarga berisiko stunting di wilayah kecamatan Jambe.
2. Kemiskinan Ekstrim yang menjadi prioritas kabupaten tangerang untuk segera dituntaskan
3. Masih adanya beberapa wilayah rawan banjir di wilayah kecamatan Jambe.
4. Perlunya peningkatan dan pengembangan UMKM di wilayah Jambe guna memberdayakan produk dalam negeri.
5. Masih kurangnya sarana dan prasarana transportasi pelayanan publik yang terintegrasi guna mendukung pelaksanaan pelayanan publik yang berkualitas.
6. Masih banyaknya pelanggaran Perda tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum.
7. Masih banyaknya infrastruktur dasar baik jalan, jembatan, saluran drainase, sarana pendidikan dan sarana kesehatan yang kurang baik dan mendesak untuk dibangun.
8. Masih minimnya kepedulian masyarakat tentang kebersihan dan persampahan.
9. Masih kurangnya koordinasi antar SKPD secara maksimal
10. Masih kurangnya tempat penyimpanan arsip yang sesuai.

Untuk menjawab isu isu di kecamatan Jambe maka dibentuklah beberapa kebijakan perencanaan kegiatan di kecamatan Jambe adalah sebagai berikut :

1. Operasional Forum Komunikasi Kecamatan Sehat (FKKS) berupa perlengkapan administrasi, rapat-rapat dan pembinaan, pendampingan lapangan.
2. Gerakan Bersama Atasi Kemiskinan Ekstream dan Stunting (Gebrak Tegas) Pencegahan dan penurunan Stunting dan penghapusan kemiskinan ekstream berupa Pemberian Makanan Tambahan (PMT) balita Stunting, rembuk stunting.
3. Penyelenggaraan pemberdayaan keluarga prasejahtera.
4. Verifikasi dan validasi data pengangguran.
5. Kecamatan tanggap bencana dan penanganan pasca bencana.
6. Pengembangan Produk Unggulan Kecamatan, pojok UMKM di Kecamatan dan Pembinaan UMKM.
7. Pengembangan Inovasi Kecamatan.
8. Pengembangan Kampung Tematik.
9. Pengelolaan Sampah berupa Pembentukan Bank Sampah, Bio Konversi dan Sirkular Ekonomi.
10. Penyediaan RTH (Ruang Terbuka Hijau).
11. Rehabilitasi RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) dan Rehabilitas yang terdampak bencana.
12. Pemeliharaan Stadion Mini.
13. Pengangkutan sampah dari tempat pembuangan sampah sementara sampai tiba di tempat pembuangan sampah di akhir untuk wilayah sekitar jalan desa/kelurahan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Jambe Tahun 2025 merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam arah kebijakan RPJPD Kabupaten Tangerang tahun 2024-2026 yang dijabarkan dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Jambe Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026. Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Kecamatan Jambe Tahun 2025 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 serta mengikuti arahan Surat Edaran Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 tentang Efisiensi Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025

Dalam konteks perencanaan pembangunan, Kecamatan Jambe Kabupaten Tangerang dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan, melayani/memenuhi kebutuhan masyarakat serta turut serta dalam Pembangunan yang selaras dengan visi-misi pemerintah pusat, Di sisi lain, dalam era globalisasi, Kecamatan Jambe dituntut untuk siap dan sanggup membuat/menyusun suatu perencanaan yang baik, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat serta menekan angka stunting dan kemiskinan ekstrim. Untuk lebih jelasnya mengenai review rancangan RKPD Perubahan Tahun 2025 dapat dilihat Tabel 2.4 (T-C.31) berikut ini:

Tabel 2.4 (T-C.31)
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Perubahan Tahun 2025
Kecamatan Jambe Kabupaten Tangerang

RANCANGAN RKPD PERUBAHAN 2025						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						Sumber Dana
Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
UNSUR KEWILAYAHAN						**UNSUR KEWILAYAHAN**						
KECAMATAN JAMBE SEMUA SUB UNIT					***16,228,643,002***	***KECAMATAN Jambe SEMUA SUB UNIT***					***16,228,643,002***	
KECAMATAN					**16,228,643,002**	**KECAMATAN**					**16,228,643,002**	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		**Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan**	**Persen**	**90%**	**8,029,480,789**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**		**Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan**	**Persen**	**90%**	**8,029,480,789**	
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Dokumen**	**6**	**219,318,900**	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Dokumen**	**6**	**219,318,900**	
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Tangerang, Jambe, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4	127,119,900	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Tangerang, Jambe, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4	127,119,900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

RANCANGAN RKPD PERUBAHAN 2025						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						Sumber Dana
Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	**Lokasi Kegiatan**	**Indikator Kinerja**	**Satuan**	**Target Capaian Kinerja**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Lokasi Kegiatan**	**Indikator Kinerja**	**Satuan**	**Target Capaian Kinerja**	**Pagu Indikatif (Rp)**	
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Tangerang, Jambe, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	38,027,000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Tangerang, Jambe, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	38,027,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Tangerang, Jambe, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	Laporan	6	54,172,000	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Tangerang, Jambe, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	Laporan	6	54,172,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**Jumlah laporan keuangan**	**Dokumen**	**2**	**5,660,298,713**	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Jumlah laporan keuangan**	**Dokumen**	**2**	**5,660,298,713**	
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Tangerang, Jambe, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	25	5,612,007,713	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Tangerang, Jambe, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	25	5,612,007,713	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

RANCANGAN RKPD PERUBAHAN 2025						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						Sumber Dana
Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	**Lokasi Kegiatan**	**Indikator Kinerja**	**Satuan**	**Target Capaian Kinerja**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Lokasi Kegiatan**	**Indikator Kinerja**	**Satuan**	**Target Capaian Kinerja**	**Pagu Indikatif (Rp)**	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Tangerang, Jambe, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	12	48,291,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Tangerang, Jambe, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	12	48,291,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		**Jumlah Laporan Pembinaan Pegawai**	**Dokumen**	**2**	**0**	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Jumlah Laporan Pembinaan Pegawai**	**Dokumen**	**2**	**0**	
Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Tangerang, Jambe, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	0	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Tangerang, Jambe, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Tangerang, Jambe, Semua Kel/Desa	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	24	0	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Tangerang, Jambe, Semua Kel/Desa	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	24	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		**Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Dokumen**	**6**	**260,428,540**	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Dokumen**	**6**	**260,428,540**	

RANCANGAN RKPD PERUBAHAN 2025						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						Sumber Dana
Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Tangerang, Jambe, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5	20,405,000	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Tangerang, Jambe, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5	20,405,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Tangerang, Jambe, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	13	58,816,340	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Tangerang, Jambe, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	13	58,816,340	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Tangerang, Jambe, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	0	0	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Tangerang, Jambe, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Tangerang, Jambe, Semua Kel/Desa	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Paket	27	42,710,800	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Tangerang, Jambe, Semua Kel/Desa	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Paket	27	42,710,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Tangerang, Jambe, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5	48,861,000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Tangerang, Jambe, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5	48,861,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

RANCANGAN RKPD PERUBAHAN 2025						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						Sumber Dana
Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	**Lokasi Kegiatan**	**Indikator Kinerja**	**Satuan**	**Target Capaian Kinerja**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Lokasi Kegiatan**	**Indikator Kinerja**	**Satuan**	**Target Capaian Kinerja**	**Pagu Indikatif (Rp)**	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Tangerang, Jambe, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	7	3,395,400	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Tangerang, Jambe, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	7	3,395,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Tangerang, Jambe, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	42,672,000	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Tangerang, Jambe, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	42,672,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Tangerang, Jambe, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	43,568,000	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Tangerang, Jambe, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	43,568,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Jumlah Laporan Jasa Penunjang**	**Jenis**	**3**	**1,315,134,676**	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Jumlah Laporan Jasa Penunjang**	**Jenis**	**3**	**1,315,134,676**	
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Tangerang, Jambe, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	9,972,000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Tangerang, Jambe, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	9,972,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

RANCANGAN RKPD PERUBAHAN 2025						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						Sumber Dana
Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	**Lokasi Kegiatan**	**Indikator Kinerja**	**Satuan**	**Target Capaian Kinerja**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Lokasi Kegiatan**	**Indikator Kinerja**	**Satuan**	**Target Capaian Kinerja**	**Pagu Indikatif (Rp)**	
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Tangerang, Jambe, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	297,465,108	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Tangerang, Jambe, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	297,465,108	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Tangerang, Jambe, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	1,007,697,568	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Tangerang, Jambe, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	1,007,697,568	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Kegiatan :Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Dokumen**	**3**	**574,299,960**	**Kegiatan :Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Dokumen**	**3**	**574,299,960**	
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Tangerang, Jambe, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	10	271,389,960	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Tangerang, Jambe, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	10	271,389,960	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

RANCANGAN RKPD PERUBAHAN 2025						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						Sumber Dana
Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	**Lokasi Kegiatan**	**Indikator Kinerja**	**Satuan**	**Target Capaian Kinerja**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Lokasi Kegiatan**	**Indikator Kinerja**	**Satuan**	**Target Capaian Kinerja**	**Pagu Indikatif (Rp)**	
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Tangerang, Jambe, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	13	19,950,000	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Tangerang, Jambe, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	13	19,950,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Tangerang, Jambe, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	4	282,960,000	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Tangerang, Jambe, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	4	282,960,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					**6,422,309,763**						**6,422,309,763**	
		Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar	**Persen**	**89,50%**	**26,536,550**			**Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar**	**Persen**	**89,50%**	**26,536,550**	
		Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara	**Persen**	**90%**	**6,395,773,213**			**Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara**	**Persen**	**90%**	**6,395,773,213**	

RANCANGAN RKPD PERUBAHAN 2025						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						Sumber Dana
Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	**Lokasi Kegiatan**	**Indikator Kinerja**	**Satuan**	**Target Capaian Kinerja**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Lokasi Kegiatan**	**Indikator Kinerja**	**Satuan**	**Target Capaian Kinerja**	**Pagu Indikatif (Rp)**	
Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		**Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana Paten di Kecamatan**	**Jenis**	**2**	**26,536,550**	**Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**		**Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana Paten di Kecamatan**	**Jenis**	**2**	**26,536,550**	
Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Tangerang, Jambe, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	2	26,536,550	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Tangerang, Jambe, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	2	26,536,550	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum		**Persentase infrastruktur yang dipelihara**	**Persen**	**5**	**6,395,773,213**	**Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**		**Persentase infrastruktur yang dipelihara**	**Persen**	**5**	**6,395,773,213**	
Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan	Kab. Tangerang, Jambe, Semua Kel/Desa	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan	Dokumen	5	6,395,773,213	Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan	Kab. Tangerang, Jambe, Semua Kel/Desa	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan	Dokumen	5	6,395,773,213	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

RANCANGAN RKPD PERUBAHAN 2025						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						Sumber Dana
Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	**Lokasi Kegiatan**	**Indikator Kinerja**	**Satuan**	**Target Capaian Kinerja**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Lokasi Kegiatan**	**Indikator Kinerja**	**Satuan**	**Target Capaian Kinerja**	**Pagu Indikatif (Rp)**	
Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum		dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum		dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		**Persentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan**	**Persen**	**92.00%**	**1,356,344,030**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		**Persentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan**	**Persen**	**92.00%**	**1,356,344,030**	
Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		**Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan/pemberdayaan**	**Kelompok**	**10**	**1,213,519,330**	**Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**		**Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan/pemberdayaan**	**Kelompok**	**10**	**1,213,519,330**	
Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan	Kab. Tangerang, Jambe, Semua Kel/Desa	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga	10	56,212,230	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan	Kab. Tangerang, Jambe, Semua Kel/Desa	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga	10	56,212,230	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Tangerang, Jambe, Semua Kel/Desa	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di	Laporan	10	1,157,307,100	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Tangerang, Jambe, Semua Kel/Desa	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di	Laporan	10	1,157,307,100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

RANCANGAN RKPD PERUBAHAN 2025						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						Sumber Dana
Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	**Lokasi Kegiatan**	**Indikator Kinerja**	**Satuan**	**Target Capaian Kinerja**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Lokasi Kegiatan**	**Indikator Kinerja**	**Satuan**	**Target Capaian Kinerja**	**Pagu Indikatif (Rp)**	
		Wilayah Kecamatan						Wilayah Kecamatan				
Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		**Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat**	**Laporan**	**10**	**142,824,700**	**Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**		**Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat**	**Laporan**	**10**	**142,824,700**	
Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kab. Tangerang, Jambe, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan	10	142,824,700	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kab. Tangerang, Jambe, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan	10	142,824,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		**Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti**	**Persen**	**100%**	**83,656,000**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		**Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti**	**Persen**	**100%**	**83,656,000**	
Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		**Jumlah kegiatan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan**	**Persen**	**100**	**83,656,000**	**Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**		**Jumlah kegiatan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan**	**Persen**	**100**	**83,656,000**	
Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional	Kab. Tangerang, Jambe,	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik	Laporan	8	83,656,000	Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional	Kab. Tangerang, Jambe,	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik	Laporan	8	83,656,000	PENDAPATAN ASLI

RANCANGAN RKPD PERUBAHAN 2025						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						Sumber Dana
Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	**Lokasi Kegiatan**	**Indikator Kinerja**	**Satuan**	**Target Capaian Kinerja**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Lokasi Kegiatan**	**Indikator Kinerja**	**Satuan**	**Target Capaian Kinerja**	**Pagu Indikatif (Rp)**	
Indonesia danInstansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Semua Kel/Desa	Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				Indonesia danInstansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Semua Kel/Desa	Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				DAERAH (PAD)
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		**Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti**	**Persen**	**100%**	**257,355,420**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		**Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti**	**Persen**	**100%**	**257,355,420**	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan UmumSesuai Penugasan Kepala Daerah		**jumlah rekomendasi yang dikeluarkan**	**Dokumen**	**3**	**257,355,420**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan UmumSesuai Penugasan Kepala Daerah**		**jumlah rekomendasi yang dikeluarkan**	**Dokumen**	**3**	**257,355,420**	
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian	Kab. Tangerang, Jambe, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara	Orang	50	161,884,000	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian	Kab. Tangerang, Jambe, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara	Orang	50	161,884,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

RANCANGAN RKPD PERUBAHAN 2025						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						Sumber Dana
Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	**Lokasi Kegiatan**	**Indikator Kinerja**	**Satuan**	**Target Capaian Kinerja**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Lokasi Kegiatan**	**Indikator Kinerja**	**Satuan**	**Target Capaian Kinerja**	**Pagu Indikatif (Rp)**	
Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				
Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kab. Tangerang, Jambe, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Orang	50	53,901,000	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kab. Tangerang, Jambe, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Orang	50	53,901,000	
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kab. Tangerang, Jambe, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	10	41,570,420	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kab. Tangerang, Jambe, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	10	41,570,420	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		**Persentase Desa Dengan Laporan Administrasi baik**	**Persen**	**85,89%**	**79,497,000**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**		**Persentase Desa Dengan Laporan Administrasi baik**	**Persen**	**85,89%**	**79,497,000**	

RANCANGAN RKPD PERUBAHAN 2025						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						Sumber Dana
Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	**Lokasi Kegiatan**	**Indikator Kinerja**	**Satuan**	**Target Capaian Kinerja**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Lokasi Kegiatan**	**Indikator Kinerja**	**Satuan**	**Target Capaian Kinerja**	**Pagu Indikatif (Rp)**	
Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Sub Kegiatan		**Jumlah desa dengan laporan keuangan baik**	**Dokumen**	**10**	**79,497,000**	**Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Sub Kegiatan**		**Jumlah desa dengan laporan keuangan baik**	**Dokumen**	**10**	**79,497,000**	
Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kab. Tangerang, Jambe, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	10	41,596,000	Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kab. Tangerang, Jambe, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	10	41,596,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Sub Kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kab. Tangerang, Jambe, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan	Laporan	10	37,901,000	Sub Kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kab. Tangerang, Jambe, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan	Laporan	10	37,901,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

2.5.1 Bahwa Usulan Program / Kegiatan yang dibahas didalam musrenbang mekanismenya diawali dari penggalian gagasan dari tingkat Desa/Kelurahan atau lingkungan melibatkan unsur Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Unsur Perempuan dan Organisasi Kemasyarakatan sehingga menghasilkan usulan program yang di bawa ke form Musrenbangdes. Pada form Musrenbangdes menghasilkan skala prioritas usulan tingkat Desa/ Kelurahan selanjutnya ditunjuk perwakilan dari Desa / Kelurahan untuk mengawal usulan tersebut di Form Musrenbang Tingkat Kecamatan.

2.5.2 Hasil Musrenbang Kecamatan merupakan Skala prioritas program yang telah sesuai dengan kebutuhan real masyarakat serta isu - isu penting yang akan menjadi prioritas dari masing-masing Perangkat Daerah yang ada pada Unit Pelaksana Teknis di tingkat Kecamatan. Perangkat Daerah Kecamatan Jambe sebagai fasilitator untuk menampung usulan dari Desa/Kelurahan yang diumumkan ke Perangkat Daerah terkait.

2.5.3 Beberapa usulan dari masyarakat pada tahun 2024 yang belum masuk dalam APBD 2025, akan dianalisa kembali pada Renja Perubahan Tahun 2025 ini sesuai dengan ketersediaan pagu yg ada.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada Rancangan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian visi, misi, dan tujuan RPJPD Kabupaten Tangerang 2024-2026.

Untuk mencapai tujuan tersebut Renstra PD Kecamatan Jambe menetapkan 1 (satu) tujuan, yaitu :

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan publik kecamatan Jambe

Dalam rangka mendukung pencapaian Rencana Strategis tersebut ditetapkan 2 (dua) sasaran strategis antara lain :

1. Terpenuhinya pelayanan publik sesuai dengan standar kecamatan
2. Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja

Program dan kegiatan yang ada di Perangkat Daerah Kantor Kecamatan Jambe pada dasarnya masih tetap mengacu dan pada tahun yang lalu dan penambahan disesuaikan dengan tuntuntan perkembangan jaman dan kebutuhan.

Pada tahun anggaran 2025 Kecamatan Jambe Kabupaten Tangerang merencanakan akan melaksanakan sebanyak 6 (Enam) program, 13 (Tiga Belas) kegiatan yang di dukung oleh 30 (Tiga Puluh) Sub Kegiatan, terlampir pada Tabel 3.1 di bawah ini:

Tabel 3.1
Perubahan Rencana Kerja Pendanaan Kecamatan Jambe Tahun Anggaran 2025

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan			Perubahan Rencana Tahun 2025				Selisih	Penanggung Jawab	Keterangan Selisih
						Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana			
	7	Unsur Kewilayahan										
	7	**Kecamatan Jambe Semua Sub Unit**						**18.607.379.269**		**2.378.736.267**	Kecamatan Jambe	
	7.01	Kecamatan						18.607.379.269		2.378.736.267		
1	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Capaian Program**	**:**	**Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan**	**Persen**	**90%**	**8.074.862.937**		**45.382.148**		
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Keluaran	:	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	Dokumen	6	252.607.900		**33.289.000**		
	7.01.01.2.01 .0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Keluaran	:	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4	139.028.900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	**11.909.000**	Kasubag Perencanaan dan Keuangan Kec. Jambe	Penambahan anggaran bahan cetak dan makan minum

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan			Perubahan Rencana Tahun 2025				Selisih	Penanggung Jawab	Keterangan Selisih
						Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana			
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		:	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	59.407.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	**21.380.000**	Kasubag Perencanaan dan Keuangan Kec. Jambe	Penambahan anggaran bahan cetak dan makan minum
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		:	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	6	54.172.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	**0**	Kasubag Perencanaan dan Keuangan Kec. Jambe	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		:	Jumlah laporan keuangan	Dokumen	2	5.521.888.981		**-138.409.732**		
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		:	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	25	5.470.943.981	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	**-141.063.732**	Kasubag Perencanaan dan Keuangan Kec. Jambe	Pengurangan Gaji dan Tunjangan karena pegawai ada yang mutasi

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan			Perubahan Rencana Tahun 2025				Selisih	Penanggung Jawab	Keterangan Selisih
						Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana			
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKP		:	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	12	50.945.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	**2.654.000**	Kasubag Perencanaan dan Keuangan Kec. Jambe	Penambahan anggaran bahan cetak dan makan minum
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		:	Jumlah Laporan Pembinaan Pegawai	Dokumen	1	39.504.000		**39.504.000**		
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	39.504.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	**39.504.000**	Kasubag Umpeg Kec. Jambe	Penambahan Pengadaan Pakaian Dinas
	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	**0**	Kasubag Umpeg Kec. Jambe	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		:	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen	7	304.980.340		**44.551.800**		
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang		:	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Paket	5	20.405.000	PENDAPATAN ASLI	**0**	Kasubag Umpeg Kec. Jambe	

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan			Perubahan Rencana Tahun 2025				Selisih	Penanggung Jawab	Keterangan Selisih
						Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana			
		an Bangunan Kantor			Bangunan Kantor yang Disediakan				DAERAH (PAD)			
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		:	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	13	103.338.140	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	**44.521.800**	Kasubag Umpeg Kec. Jambe	Penambahan Pembelian Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		:	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	**0**	Kasubag Umpeg Kec. Jambe	
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		:	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Paket	27	42.710.800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	**0**	Kasubag Umpeg Kec. Jambe	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		:	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5	48.861.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	**0**	Kasubag Umpeg Kec. Jambe	
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	7	3.395.400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	**0**		

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan			Perubahan Rencana Tahun 2025				Selisih	Penanggung Jawab	Keterangan Selisih
						Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana			
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu		:	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	42.672.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	**0**	Kasubag Umpeg Kec. Jambe	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		:	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	43.598.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	**30.000**	Kasubag Umpeg Kec. Jambe	Penghapusan biaya tiket pesawat yang berpotensi tidak dilaksanakan, dan penambahan uang harian rapat
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		:	Jumlah Laporan Jasa Penunjang	Jenis	3	1.409.934.676		**94.800.000**		
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	9.972.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	**0**	Kasubag Umpeg Kec. Jambe	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		:	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	Laporan	12	297.465.108	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	**0**	Kasubag Umpeg Kec. Jambe	

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan			Perubahan Rencana Tahun 2025				Selisih	Penanggung Jawab	Keterangan Selisih
						Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana			
					dan Listrik yang Disediakan							
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		:	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	1.102.497.568	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	**94.800.000**	Kasubag Umpeg Kec. Jambe	Penambahan Honor THR & Gaji 13 Non ASN Kecamatan Jambe
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Keluaran	:	Jumlah\ Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	3	545.947.040		**-28.352.920**		

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan			Perubahan Rencana Tahun 2025				Selisih	Penanggung Jawab	Keterangan Selisih
						Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana			
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Keluaran	:	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	10	279.987.040	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	**8.597.080**	Kasubag Umpeg Kec. Jambe	Pengurangan karena ada pertukaran anggaran kode rekening pada BBM dan Pemeliharaan Motor Sampah, dan Penambahan armada truk sampah
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Keluaran	:	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	13	41.950.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	**22.000.000**	Kasubag Umpeg Kec. Jambe	Penambahan pemeliharaan komputer
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Keluaran	:	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	4	224.010.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	**-58.950.000**	Kasubag Umpeg Kec. Jambe	Pengurangan 1 pemeliharaan untuk pengadaan yang lainnya yang dianggap lebih urgent

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan			Perubahan Rencana Tahun 2025				Selisih	Penanggung Jawab	Keterangan Selisih
						Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana			
2	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				**Persen**	**89,50%**	**8.744.723.882**		**2.322.414.119**		
			Capaian Program	:	**Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar**	**Persen**	89,50%	26.536.550		**0**		
					Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara	**Persen**	90%	8.718.187.332		**2.322.414.119**		
	7.01.02.2.02	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Keluaran	:	Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana Paten di Kecamatan	jenis	2	26.536.550,00		**0**		

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan			Perubahan Rencana Tahun 2025				Selisih	Penanggung Jawab	Keterangan Selisih
						Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana			
	7.01.02.2.02.0003	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Keluaran	:	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	2	26.536.550,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	**0**	Kasi Pelayanan Kec. Jambe	
	7.01.02.2.03	Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Keluaran	:	Persentase infrastruktur yang dipelihara	Persen	5	8.718.187.332		**2.322.414.119**		

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan			Perubahan Rencana Tahun 2025				Selisih	Penanggung Jawab	Keterangan Selisih
						Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana			
	7.01.02.2.03.0001	Sub kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Keluaran	:	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Dokumen	5	8.718.187.332	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	**2.322.414.119**	Kasi Pelayanan Kec. Jambe	Penambahan titik untuk kegiatan infrastruktur di Kecamatan, dan Pengadaan Gerobak Motor untuk penanganan sampah
3	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Capaian Program**	:	**Persentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/ pemberdayaan**	**Persen**	92%	1.356.344.030		**0**		
	7.01.03.2.01	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Keluaran	:	Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan/ pemberdayaan	kelompok	10	1.213.519.330,00		**0**		

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan			Perubahan Rencana Tahun 2025				Selisih	Penanggung Jawab	Keterangan Selisih
						Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana			
	7.01.03.2.01.0001	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Keluaran	:	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	lembaga	10	56.212.230	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	**0**	Kasi Pemberdayaan Kec. Jambe	
	7.01.03.2.01.0003	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Keluaran	:	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	laporan	10	1.157.307.100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	**0**	Kasi Pemberdayaan Kec. Jambe	
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Keluaran	:	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan	10	142.824.700		**0**		
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Keluaran		Meningkatnya kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pembe	laporan	10	142.824.700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	**0**	Kasi Pemberdayaan Kec. Jambe	

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan			Perubahan Rencana Tahun 2025				Selisih	Penanggung Jawab	Keterangan Selisih
						Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana			
					rdayaan Kec. Jambe							
4	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Capaian Program**	:	**Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti**	**Persen**	100%	83.656.000		**0**		
	7.01.04.2.01	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Keluaran	:	Jumlah kegiatan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	Persen	8	83.656.000		**0**		
	7.01.04.2.01 .0001	Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Keluaran		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	8	83.656.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	**0**	Kasi Trantibum dan Linmas Kec. Jambe	

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan			Perubahan Rencana Tahun 2025				Selisih	Penanggung Jawab	Keterangan Selisih
						Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana			
5	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Capaian Program**		**Persentase Desa Dengan Laporan Administrasi baik**	**Persen**	**85,89%**	**90.437.000**		**10.940.000**		
	7.01.06.2.01	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Keluaran		Jumlah desa dengan laporan keuangan baik	**Dokumen**	10	90.437.000		**10.940.000**		
	7.01.06.2.01 .0002	Sub kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Keluaran		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	10	52.536.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	**10.940.000**	Kasi Binwas Pemdes Kec.Jambe	Penambahan anggaran kegiatan dalam sub kegiatan
	7.01.06.2.01 .0017	Sub Kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Keluaran		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan	Laporan	10	37.901.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	**0**	Kasi Binwas Pemdes Kec.Jambe	
6	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN**			**Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti**	**Persen**	**100%**	**257.355.420**		**0**		

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan			Perubahan Rencana Tahun 2025				Selisih	Penanggung Jawab	Keterangan Selisih
						Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana			
		PEMERINTAHAN UMUM										
	7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**			**jumlah rekomendasi yang dikeluarkan**	**Persen**	**3**	**257.355.420**		**0**		
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta	Orang	50	161.884.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	**0**	Kasi Pemerintahan Umum Kec. Jambe	

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan			Perubahan Rencana Tahun 2025				Selisih	Penanggung Jawab	Keterangan Selisih
						Satuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana			
		serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia			Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia							
	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Orang	50	53.901.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	**0**	Kasi Pemerintahan Umum Kec. Jambe	
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	10	41.570.420	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	**0**	Kasi Pemerintahan Umum Kec. Jambe	

BAB IV
PENUTUP

Renja Perubahan Kecamatan Jambe Kabupaten Tangerang Tahun 205 ini dibuat sesuai dengan Surat Edaran Efisiensi dari Pemerintah Pusat dan memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Kecamatan Jambe Kabupaten Tangerang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada saat perubahan di 2025 ini, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

5.1 Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Renja Perubahan Kecamatan Jambe Kabupaten Tangerang Tahun 2025 antara lain :

1. Perumusan program dan kegiatan beserta indikatornya pada Renja Perubahan Kecamatan Jambe Kabupaten Tangerang pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tangerang;
2. Penyusunan Renja Perubahan Kecamatan Jambe Kabupaten Tangerang 2025 merupakan pedoman dalam melakukan kegiatan kecamatan pada tahun 2025. Selain itu terdapat penambahan output/ keluaran kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Kecamatan Jambe;
3. Penyusunan Renja Perubahan Kecamatan Jambe Kabupaten Tangerang ini juga berpedoman pada RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2025, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.
4. Penyusunan Renja Perubahan Kecamatan Jambe Kabupaten Tangerang ini juga mengacu pada Surat Edaran Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 tentang Efisiensi Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Kaidah pelaksanaan dokumen Renja Perubahan Kecamatan Jambe Kabupaten Tangerang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan Renja Perubahan Kecamatan Jambe Kabupaten Tangerang berpedoman pada RPD tahun pertama yaitu 2024 dan RKPD Perubahan Kabupaten Tangerang Tahun 2025
2. Penyusunan Renja Perubahan Kecamatan Jambe Kabupaten Tangerang Tahun 2025 adalah upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan yang bersumber dari dana APBD Perubahan Kabupaten Tangerang dengan berpedoman pada dokumen perencanaan

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Rencana Tindak Lanjut dari penyusunan dokumen Renja Perubahan Kecamatan Jambe Kabupaten Tangerang Tahun 2025 ini adalah

melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan serta melaksanakan pengendalian setiap triwulan baik untuk realisasi anggaran maupun atas kinerja yang telah ditetapkan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Kecamatan Jambe Kabupaten Tangerang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan stakeholder pembangunan di Kabupaten Tangerang

Demikian dengan tersusunnya Renja Perubahan Kecamatan Jambe ini semoga dapat menjadi pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan di Tahun 2025 Kecamatan Jambe Kabupaten Tangerang agar dapat terwujud konsistensi antara perencanaan penganggaran serta pelaksanaan program dan kegiatan di Kecamatan Jambe, dan tersusunnya Renja Perubahan Kecamatan Jambe Tahun 2025 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian visi Pemerintah Kabupaten Tangerang.

50. Kecamatan Jayanti

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Secara umum tugas dan kewajiban pemerintah adalah menciptakan regulasi pelayanan umum pengembangan sumber daya produktif, menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, pelestarian nilai-nilai sosial kultural dan memperkuat kesatuan bangsa, pengembangan kehidupan demokrasi, menciptakan keadilan, pelestarian lingkungan hidup, penerapan dan penegakan undang-undang dan mengembangkan kehidupan berbangsa dan bernegara.

(Rencana Kerja Perangkat Daerah Perubahan) disusun karena adanya dinamika dalam pelaksanaan pembangunan daerah yang menyebabkan perlu dilakukan penyesuaian terhadap Rencana Kerja (Renja) awal yang telah ditetapkan. Dokumen ini biasanya disusun oleh Perangkat Daerah (PD) sebagai bagian dari dokumen perencanaan tahunan yang mengalami perubahan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) merupakan dokumen perencanaan tahunan yang memuat program, kegiatan, dan sub-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Namun, dalam perjalanannya, pelaksanaan Renja Tahun 2025 mengalami dinamika yang memerlukan penyesuaian baik dari sisi kebijakan, teknis pelaksanaan, maupun ketersediaan anggaran.

Renja Perubahan Kecamatan Jayanti Tahun 2025 disusun sebagai bentuk respons terhadap hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada semester I, serta menindaklanjuti adanya perubahan kebijakan dan alokasi anggaran dari Pemerintah Daerah. Beberapa kegiatan prioritas perlu disesuaikan, baik dalam bentuk pengurangan, penambahan, maupun pergeseran kegiatan, guna menjamin ketercapaian target kinerja kecamatan secara optimal.

Selain itu, terdapat pula kebutuhan penyesuaian kegiatan sebagai dampak dari aspirasi masyarakat yang muncul dalam Musrenbang, perubahan kondisi wilayah, serta arahan strategis dari pimpinan daerah dalam rangka percepatan pelayanan publik dan peningkatan tata kelola pemerintahan di tingkat kecamatan.

Dengan demikian, penyusunan Renja Perubahan ini diharapkan mampu memberikan arah pelaksanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran, efisien, dan responsif terhadap perkembangan situasi dan kebutuhan masyarakat Kecamatan Jayanti.

Untuk mewujudkan tugas-tugas tersebut tentunya membutuhkan suatu pemerintah yang bersih dan berwibawa dengan menerapkan nilai-nilai dan normanorma yang dijunjung tinggi oleh bangsa. Dalam pelaksanaan diperlukan penerapan prinsip Good governance yang memuat prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, rule of law profesionalisme, efektivitas dan efesiensi.

Sebagai sebuah Dokumen penting Pemerintah Daerah, Renja mempunyai kedudukan yang strategis, karena Renja menerjemahkan Perencanaan Strategis (Renstra) ke dalam rencana, program dan

penganggaran tahunan. Renja sangatlah penting sebagai acuan OPD Kecamatan Jayanti untuk melaksanakan fungsinya sebagai pelayan masyarakat, sehingga masyarakat merasa puas dan senang akan pelayanan yang diberikan oleh Kecamatan Jayanti.

Proses penyusunan RENJA didasarkan pada penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan Daerah pada tahun sebelumnya.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Jayanti Tahun 2025 adalah:

1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286);
2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tamgbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 No. 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4437) ;
4. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
5. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, Tata cara evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Mentri PPN/Kepala Bappenas Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019;
7. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 113 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang.
8. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026.
9. Keputusan Bupati Nomor 16 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2025

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Jayanti Tahun 2025 dimaksudkan sebagai upaya untuk menyesuaikan rencana pembangunan tahunan Kecamatan dengan dinamika perkembangan yang terjadi, baik dari aspek kebijakan, anggaran, kondisi riil lapangan, maupun hasil evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan semester pertama tahun anggaran berjalan. Dokumen ini menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan Kecamatan yang lebih akurat, realistis, dan selaras dengan prioritas pembangunan daerah.

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Jayanti Tahun 2024 ini adalah ***Meningkatkan Pelayanan Publik Kecamatan.*** Dan Penyusunan Renja Perubahan ini bertujuan untuk:

1. Menyesuaikan target kinerja program dan kegiatan Kecamatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan semester I Tahun 2025.
2. Mengakomodasi perubahan kebijakan, prioritas pembangunan, dan alokasi anggaran dari Pemerintah Daerah.
3. Menyempurnakan rencana kerja tahunan agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan kondisi wilayah terkini.
4. Menjamin efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan melalui perencanaan yang lebih tepat sasaran.
5. Menyelaraskan pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan dengan arah pembangunan daerah dalam RPJMD dan RKPD Perubahan Kabupaten/Kota.

1.4 Sistimatika Penulisan

Rencana Kerja Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN
Bab ini mencakup tentang latar belakang penyusunan Renja Tahun 2025, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan penyusunan Renja Tahun 2025 dan Sistematika Penulisan.

II. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
Bab ini mencakup tentang Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, review terhadap Rancangan Awal RKPD dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
Bab ini mencakup tentang rencana kerja dan anggaran Perubahan tahun 2025.

V. PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAN

2.1 Evaluasi Renja Sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 Kecamatan Jayanti

Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang pada Tahun 2025 melaksanakan 6 Program dan 12 Kegiatan dan 33 Sub Kegiatan. Dengan program dan kegiatan yang ada pada tahun 2024 ini dapat mendukung capaian Sasaran Perangkat Daerah yang telah tertuang dalam Renstra OPD Kecamatan Jayanti Tahun 2024 - 2026.

Turunan Renja OPD tertuang dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dengan capaian Program dan Kegiatannya dapat kita lihat dalam evaluasi Renja tahun lalu, dan sebagai acuan kinerja tahun berikutnya.

Adapun Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
   Dengan Kegiatan :
   a. Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah
   b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
   d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
   e. Penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah
   f. Pemeliharaan barang milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
   a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
   b. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
   a. Koordinasi kegiatan pemberdayaan Desa
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
   a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
   a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
1. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
   a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Pengukuran kinerja Kecamatan Jayanti di dasarkan pada sasaran-sasaran dengan capaian sasaran sebagaimana pada tabel berikut ini :

Capaian Indikator Kinerja
Program dan Kegiatan Triwulan II Kecamatan Jayanti
Tahun Anggaran 2025

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Capaian (%)	Realisasi Fisik Kegiatan (%)	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Satuan	Target indikator	Realisasi Indikator	Capaian (%)
2	3	4	5=(4/3)*100	6	7	8	9	10	11=(10/9) *100
KECAMATAN									
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.544.069.367,00	3.078.615.530,00	47,04 %	52,96 %	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	%	53	53	100,00 %
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	57.030.000,00	26.600.000,00	46,64 %	64,04 %	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	Dokumen	6	6	100,00 %
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.260.000,00	9.000.000,00	73,41 %	74,27 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	-	-	0,00 %
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	19.995.000,00	5.475.000,00	27,38 %	67,14 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	2	100,00 %
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24.775.000,00	12.125.000,00	48,94 %	50,70 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	2	2	100,00 %
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.441.708.739,00	2.209.983.168,00	49,76 %	66,30 %	Jumlah dokumen dokumen adminstrasi keuangan	Dokumen	8	8	100,00 %

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.427.278.739,00	2.199.033.168,00	49,67 %	56,19 %	Jumlah Dokumen Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dokumen	6	6	100,00 %
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	14.430.000,00	10.950.000,00	75,88 %	76,41 %	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	2	2	100,00 %
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	96.080.200,00	17.208.000,00	17,91 %	33,58 %	Jumlah dokumen Pembinaan Pegawai	Dokumen	-	-	0,00 %
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	51.245.000,00	17.208.000,00	33,58 %	33,58 %	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	-	-	0,00 %
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	44.835.200,00	0,00	0,00 %	0,00 %	Jumlah Dokumen Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Dokumen	-	-	0,00 %
Administrasi Umum Perangkat Daerah	412.778.800,00	140.112.970,00	33,94 %	49,48 %	Jumlah dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen	22	22	100,00 %
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	10.840.000,00	0,00	0,00 %	0,00 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	-	-	0,00 %
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	135.581.300,00	24.000.000,00	17,70 %	17,76 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100,00 %
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	20.870.500,00	16.618.500,00	79,63 %	79,63 %	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	-	-	0,00 %
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	32.544.000,00	22.885.000,00	70,32 %	70,57 %	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Paket	1	1	100,00 %
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	25.820.000,00	4.803.600,00	18,60 %	23,00 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	2	100,00 %
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	82.968.000,00	33.655.870,00	40,56 %	48,79 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	6	6	100,00 %

Fasilitasi Kunjungan Tamu	58.797.000,00	27.345.000,00	46,51 %	53,65 %	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	6	6	100,00 %
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45.358.000,00	10.805.000,00	23,82 %	52,95 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	6	6	100,00 %
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.051.015.768,00	479.515.422,00	45,62 %	53,27 %	Jumlah Dokumen Jasa Penunjang	Dokumen	18	18	100,00 %
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.832.200,00	4.916.100,00	50,00 %	50,00 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	6	6	100,00 %
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	112.134.000,00	40.641.322,00	36,24 %	50,00 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	6	6	100,00 %
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	929.049.568,00	433.958.000,00	46,71 %	59,82 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	6	6	100,00 %
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	485.455.860,00	205.195.970,00	42,27 %	48,67 %	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	14	14	100,00 %
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	70.622.884,00	31.343.228,00	44,38 %	52,78 %	Jumlah Dokumen Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Dokumen	6	6	100,00 %
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	156.182.976,00	41.162.742,00	26,36 %	35,11 %	Jumlah Dokumen Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Dokumen	6	6	100,00 %
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	28.650.000,00	3.150.000,00	10,99 %	50,26 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	14	14	100,00 %
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	230.000.000,00	129.540.000,00	56,32 %	56,52 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Unit	1	1	100,00 %

					yang Dipelihara/Direhabilitasi				
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4.629.298.040,00	2.216.444.000,00	47,88 %	48,78 %	Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara	%	46	46	100,00 %
					Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar	%	50	50	100,00 %
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	31.737.600,00	9.044.000,00	28,50 %	49,21 %	Jumlah laporan pelayanan	Dokumen	2	2	100,00 %
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	31.737.600,00	9.044.000,00	28,50 %	49,21 %	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Dokumen	2	2	100,00 %
Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	4.597.560.440,00	2.207.400.000,00	48,01 %	48,35 %	Jumlah dokumen pemeliharaan	Dokumen	27	27	100,00 %
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	4.597.560.440,00	2.207.400.000,00	48,01 %	48,35 %	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Dokumen	27	27	100,00 %
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.541.298.500,00	731.837.798,00	47,48 %	75,69 %	Prosentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	%	54	54	100,00 %
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1.541.298.500,00	731.837.798,00	47,48 %	75,69 %	Jumlah Laporan Pemberdayaan	Dokumen	7	7	100,00 %
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	69.800.900,00	69.491.100,00	99,56 %	100,00 %	Jumlah Dokumen Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Dokumen	-	-	0,00 %

Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1.471.497.600,00	662.346.698,00	45,01 %	51,37 %	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	7	7	100,00 %
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	63.975.000,00	8.970.000,00	14,02 %	26,34 %	Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	%	50	50	100,00 %
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	63.975.000,00	8.970.000,00	14,02 %	26,34 %	Jumlah laporan gangguan trantibum	Dokumen	2	2	100,00 %
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	63.975.000,00	8.970.000,00	14,02 %	26,34 %	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	2	2	100,00 %
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	258.142.000,00	25.726.000,00	9,97 %	37,46 %	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	%	50	50	100,00 %
					Persentase tertib administrasi pemerintahan desa	%	50	50	100,00 %
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	258.142.000,00	25.726.000,00	9,97 %	37,46 %	Jumlah rekomendasi yang dikeluarkan	Dokumen	4	4	100,00 %
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara	226.496.000,00	2.920.000,00	1,29 %	2,60 %	Jumlah Dokumen Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Dokumen	2	2	100,00 %

Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	31.646.000,00	22.806.000,00	72,07 %	72,32 %	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi	Dokumen	2	2	100,00 %
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	60.291.000,00	30.782.000,00	51,06 %	57,01 %	Persentase pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa	%	54	54	100,00 %
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	60.291.000,00	30.782.000,00	51,06 %	57,01 %	Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Dokumen	6	6	100,00 %
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	14.725.000,00	5.824.000,00	39,55 %	40,07 %	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	2	2	100,00 %
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	22.790.000,00	7.730.000,00	33,92 %	55,33 %	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Dokumen	2	2	100,00 %
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	22.776.000,00	17.228.000,00	75,64 %	75,64 %	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	2	2	100,00 %

Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja Kecamatan Jayanti sampai dengan tahun berjalan yaitu Tahun 2025 terhadap target di Tahun 2025. Evaluasi terhadap capaian Renstra Kecamatan Jayanti Tahun 2024-2026 telah dapat dilakukan, dimana capaian kinerja Tahun 2024 sebagai tahun ke-dua pelaksanaan Renstra Kecamatan Jayanti 2024-2026 telah dapat diketahui. Adapun hasil evaluasi adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel T-C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025

Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang

Kode	Urusan/Bidang Urusan PD Dan Program/Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) 2025)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegaitan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja PD tahun 2023	Tingkat Realisasi(%)		Realisasi Capaian Program dan Kegaitan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat capaian realiasi target Renstra (%)
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	**100%**	**100%**	**25%**	**25%**	**100**	**100%**	**50%**	**100%**
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	12	100%	3	3	100	6	6	6
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dokumen adminstrasi keuangan	16	100%	1	1	100	1	8	1
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Pembinaan Pegawai	4					1		4
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	74	100%	2	2	100	8	22	8
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Jasa Penunjang	36	100%	1	1	100	3	18	3
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	53	100%	3	3	100	4	14	4

7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara	**100%**	**100**	**20,6%**	**20,6%**	**100**	**100%**	**46%**	**100%**
		Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar	**91,94**						**50%**	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah laporan pelayanan	4	3	1	1	100	1	2	1
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah dokumen pemeliharaan	59	60	1	1	100	1	27	1
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Prosentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	**100%**	**75**	**15%**	**15%**	**100**	**100%**	**54%**	**100%**
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Pemberdayaan	13	75	4	4	100	2	7	7
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	**100%**	**71,43%**	**8,75%**	**8,75%**	**100**	**100%**	**50%**	**100%**
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan gangguan trantibum	4	71.43%	1	1	100	4	2	4
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	**100%**	**-**				**100%**	**50%**	**100%**
		Persentase tertib administrasi pemerintahan desa	**100%**					**100%**	**50**	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah rekomendasi yang dikeluarkan	12	-				2	4	2
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Persentase pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa	**100%**	**91,67**	**9,39%**	**9,39%**	**100**	**100%**	**55%**	**100%**
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	8	2	2	2	100	100%	6	7

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan, antara lain:

a. Adanya kondisi dan regulasi yang berdampak pada pengurangan sasaran kegiatan atau tahapan kegiatan;
b. telah tercapainya keluaran yang ditetapkan, namun dari sisi keuangan belum mencapai 100%;
c. adanya tahapan atau sub output yang serupa, baik dengan OPD lain dengan sasaran wilayah maupun dengan pemerintahan desa;
d. pengeluaran kegiatan sesuai dengan kewajiban pembayaran pihak penyedia jasa;
e. perlunya pelaksanaan yang komprehensif (terpadu/terkait dengan OPD teknis lain) sehingga bila pelaksanaannya dipaksakan akan menimbulkan permasalahan baru;
f. waktu untuk melaksanakan kegiatan, tersita karena tugas-tugas pembantuan dan penugasan untuk menangani hal-hal tertentu yang berkaitan dengan kewilayahan dan pemberdayaan masyarakat;
g. masih kurangnya pemahaman tentang kegiatan/program yang akan diselenggarakan;
h. kelompok sasaran atau target yang sama dengan kegiatan pada pemerintahan desa dan OPD lain.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja/kegiatan Tahun 2025, implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Kecamatan Jayanti adalah:

1. Terhadap program yang realisasinya telah memenuhi target sesuai Renstra Kecamatan Jayanti, berdampak positif bagi kelancaran administrasi perkantoran pada khususnya dan kepada masyarakat Kecamatan Jayanti pada umumnya; dan
2. Terhadap program yang realisasinya belum memenuhi target sesuai Renstra Kecamatan Jayanti berdampak pada laporan kinerja realisasi keuangan Kecamatan Jayanti.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Jayanti

Lingkup analisis kinerja pelayanan di Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang meliputi analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal yang dapat menghasilkan kesimpulan analisis berupa daftar prioritas faktor lingkungan, baik internal maupun eksternal, serta dampak terhadap kelangsungan organisasi pada masa yang akan datang. Yang selanjutnya akan berpengaruh pada hubungan internal organisasi pada gilirannya dapat ditentukan oleh faktor kunci keberhasilan, antara lain :

1. Lingkungan internal

   Kekuatan :
   - Visi dan misi organisasi yang jelas
   - Kekuatan hukum tentang tugas pokok dan fungsi Kecamatan
   - Adanya alokasi anggaran bagi Kecamatan
   - Kewenangan koordinasi di tingkat Kecamatan
   - Adanya sarana dan prasarana yang memadai

   Kelemahan :
   - Jumlah dan kualitas SDM yang belum memadai
   - Belum adanya SPM Kecamatan Jayanti

- Belum tertib dan lemahnya sistem administrasi perkantoran
- Belum optimalnya penyusunan kebijakan dan perencanaan

2. Lingkungan eksternal
   Peluang:
   - RPJM Kabupaten Tangerang Tahun 2024 - 2026
   - Agenda pembangunan tahunan Kabupaten Tangerang
   - Dukungan dan partisipasi masyarakat luas
   - Diklat peningkatan kualitas aparatur
   - Kehidupan sosial, budaya dan keragaman masyarakat
   - Kebutuhan akan rasa aman, tertib dan tentram.

   Ancaman :
   - Kecendrungan masyarakat untuk mengabaikan peraturan dan kewajiban yang mengikat
   - Kondisi ekonomi masyarakat yang masih relatif rendah
   - Belum adanya batas wilayah yang permanen
   - Partisipasi masyarakat yang masih kurang

Analisis pencapaian pelayanan minimal Kecamatan Jayanti, merupakan kajian terhadap capaian kinerja berdasarkan indikor kinerja yang sudah ditentukan dalam Renstra 2023-2026 dan perkiraan pencapaian Renstra 2024-2026, sebagaimana tertuang dalam tabel dibawah ini :

Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Jayanti
Kabupaten Tangerang

No.	Indikator Kinerja Utama	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2027	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	66%				68,75%				Bukan termasuk Indeks Pelayanan lagi
2	Nilai AKIP Kecamatan Jayanti	Nilai AKIP Kecamatan Jayanti	77	77,5	80		63,45	64,45	80		
3	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	85	85,5	86	84,50	82,50	83,13	86	84	Nilai Realisasi Sesuai hasil Survey Kepuasan Semester 1

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Jayanti bahwa ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut :

1. Belum optimalnya Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, dengan belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan umum akan pada nilai evaluasi Akip yang kurang baik karena tidak adanya data base yang memadai dan mendukung sehingga perlunya monitoring secara berkala baik itu kinerja maupun anggaran kegiatannya yang mendukung pencapaian yang baik. Dan belum optimalnya pemahaman Pemerintahan Desa terkait ketertiban dan kelengkapan administrasi laporan keuangan, akan berakibat pada buruk penyelenggaraan pemerintahan desa sehingga perlu diadakannya monitoring dan evaluasi pemerintahan desa ;
2. Pelayanan Publik yang belum optimal. Kecamatan sebagai salah satu SKPD di Pemerintah Kabupaten Tangerang yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamikan ativitas masyarakat;

Pemetaan terhadap permasalahan di Kecamatan Jayanti perlu dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan yang dirumuskan dalam Rencana strategis Kecamatan Jayanti Tahun 2024-2026. Berikut isu penting yang ada di Kecamatan Jayanti :

Tabel
Isu-Isu Penting Kecamatan Jayanti

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Isu Strategis	Solusi	PROGRAM
1	2	3	4	5	6	
1	Belum Optimalnya Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan Belum Optimal	Belum Tersedianya Database Rencana Pembangunan	Database Rencana Pembangunan belum tersedia secara optimal sehingga berdampak pada nilai evaluasi AKIP	Adanya Monitoring dan Evaluasi setiap Triwulan pada kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**
			Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tidak Tepat Waktu	Belum Optimalnya pemahaman Pemerintahan Desa terkait ketertiban dan kelengkapan administrasi laporan keuangan	diadakan monitoring dan evaluasi dengan indikator Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa pada kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**
			Pemberdayaan ekonomi kerakyatan masih rendah	Belum optimalnya pergerakan ekonomi kerakyatan, UMKM dan kelompk masyarakat	diadakan fasilitasi pemberdayaan kelompok pada kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**

			Pembinaan Keagamaan, Sosial dan Kepemudaan serta ketentraman dan ketertiban umum belum maksimal	Kondisi Urban Kecamatan Jayanti yang di lapangan masih terdapat beberapa kondisi yang perlu penanganan diantaranya ketertiban pasar sentiong, ketertiban dan kenakalan remaja	adanya kegiatan monitoring secara berkala dan bekerja sama dengan pihak terkait seperti Polsek terdapat pada sub kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian dan Koramil Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**
			Kebijakan tata ruang wilayah kecamatan yang belum tertata dengan memperhatikan lingkungan Masih minimnya kepedulian masyarakat tentang kebersihan dan persampahan Infrastruktur penunjang lingkungan masih minim	Masih belum optimalnya penataan ruangan, lingkungan dan kebersihan di wilayah Kecamatan Jayanti	adanya kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum untuk memfasilitasi masalah tersebut, mulai dari penanganan sampah oleh petugas kebersihan hingga pemeliharaan fasilitas umum serta rumah tidak layak huni	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**

		Belum Optimalnya Pelayanan Publik	Penerapan Sistem Pelayanan Berbasis IT Rendah	kepuasan masyarakat pada pelayanan di Kecamatan Jayanti masih belum oprimal	adanya Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**
			Infrastruktur Pelayanan Publik Masih Kurang			
			Kurangnya Koordinasi dan Pembinaan Pelayanan Publik dengan Pemerintah Desa			
			SOP dan SPM yang dibuat belum sesuai dengan standar			

2.4 Review Terhadap Awal RKPD Rancangan

Rencana kerja bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan apabila ditunjang dengan dokumen perencanaan yang baik, dalam rangka mengawal program dan kegiatan pembangunan agar dapa berjalan secara efektif dan efisien serta tepat sasaran. Dokumen perencanaan berawal dari RPJMD Kabupaten Tangerang, Rencana Strategis Kecamatan dan Rencana Kerja Kecamatan.

Rencana kerja Kecamatan tahun 2025 sesuai dengan Renstra Kecamatan Jayanti tahun 2024 - 2026, rencana kerja ini agar mewujudkan konsistensi dokumen perencanaan Kecamatan. Sehingga dapat mewujudkan seluruh program dan kegiatan Kabupten Tangerang yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Tangerang.

Tabel T-C.31
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang

RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL ANALISA KEBUTUHAN				Keterangan Perbedaan
Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	**Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan**	**Indikator**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan**	**Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan**	**Indikator**	**Pagu Indikatif (Rp)**	
KECAMATAN			13.422.338.429,00	KECAMATAN			13.422.338.429,00	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	100 Persen	6.690.348.003,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	100 Persen	6.799.333.889,00	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	77.083.900,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	69.600.000,00	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	13.557.500,00		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	12.260.000,00	Adanya Efisiensi Anggaran
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	37.288.800,00		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	19.995.000,00	Adanya Efisiensi Anggaran

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	26.237.600,00		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	24.775.000,00	Adanya Efisiensi Anggaran
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang	4.235.610.142,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang	4.442.818.739,00	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/bulan	4.207.568.342,00		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/bulan	4.420.143.261,00	Adanya kekurangan pembayaran tunjangan dan TPBK ASN
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	28.041.800,00		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	14.430.000,00	Adanya Efisiensi Anggaran
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	125.065.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	108.347.000,00	
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	74.427.000,00		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	51.245.000,00	Sesuai dengan Kebutuhan dan jumlah pegawai
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				

	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	40 Orang	50.638.000,00		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	40 Orang	44.835.200,00	Sesuai dengan Kebutuhan dan jumlah pegawai
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	543.296.500,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	481.979.800,00	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.453.400,00		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.840.000,00	Sesuai dengan jumlah kebutuhan
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	176.649.700,00		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	335.581.300,00	Sesuai dengan jumlah kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	10.500.000,00		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	20.870.500,00	Sesuai dengan jumlah kebutuhan
Penyediaan Bahan Logistik Kantor				Penyediaan Bahan Logistik Kantor				
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	43.878.000,00		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	32.544.000,00	Sesuai dengan jumlah kebutuhan
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				

	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	56.999.000,00		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	25.820.000,00	Sesuai dengan jumlah kebutuhan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	27.086.400,00		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	82.968.000,00	Sesuai dengan jumlah kebutuhan
Fasilitasi Kunjungan Tamu				Fasilitasi Kunjungan Tamu				
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	90.400.000,00		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	58.797.000,00	Adanya Efisiensi Anggaran
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	127.330.000,00		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	45.358.000,00	Adanya Efisiensi Anggaran
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1.144.391.480,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1.051.015.768,00	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat				Penyediaan Jasa Surat Menyurat				
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	30.797.880,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	9.832.200,00	Adanya Efisiensi Anggaran
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	161.599.600,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	112.134.000,00	Sesuai dengan kebutuhan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	951.994.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	991.449.568,00	Adanya penambahan

								gaji THR dan gaji 13 Non ASN
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	564.900.981,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	485.455.860,00	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	77.442.892,00		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	70.622.884,00	Sesuai dengan kebutuhan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	175.534.988,00		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	156.182.976,00	Sesuai dengan kebutuhan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	21.350.000,00		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	28.650.000,00	Sesuai dengan kebutuhan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	290.573.101,00		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	230.000.000,00	Sesuai dengan kebutuhan
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar	100 90 Persen Persen	5.476.319.212,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar	100 90 Persen Persen	4.699.298.040,00	

DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara			DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara			
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Dokumen	45.804.200,00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Dokumen	41.497.800,00	
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				
	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3 Laporan	45.804.200,00		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3 Laporan	31.737.600,00	Adanya Efisiensi Anggaran
Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	1 Dokumen	5.430.515.012,00	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	1 Dokumen	4.605.230.440,00	
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				
	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	4 Dokumen	5.430.515.012,00		Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	4 Dokumen	4.667.560.440,00	Adanya rincian belanja yang dialihkan

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	100 Persen	1.594.557.340,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	100 Persen	1.541.298.500,00	
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Dokumen	1.594.557.340,00	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Dokumen	1.734.301.900,00	
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5 Lembaga Kemasyarakatan	64.994.140,00		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5 Lembaga Kemasyarakatan	69.800.900,00	Seuai dengan krbutuhan
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				
	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1.529.563.200,00		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1.471.497.600,00	Seuai dengan krbutuhan
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	100 Persen	118.488.700,00	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	100 Persen	63.975.000,00	
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	118.488.700,00	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	88.050.000,00	

Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				
	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	118.488.700,00		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	63.975.000,00	Adanya Efisiensi Anggaran
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	100 Persen	172.110.700,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	100 Persen	258.142.000,00	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	40 Orang	49.688.600,00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	40 Orang	311.040.000,00	Adanya kegiatan HUT RI yang merupakan kewenangan dalam kegiatan ini
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				

	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	40 Orang	226.496.000,00		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	40 Orang	226.496.000,00	
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				
	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	122.422.100,00		Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	31.646.000,00	Adanya Efisiensi Anggaran
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase tertib administrasi pemerintahan desa	100 Persen	155.726.600,00	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase tertib administrasi pemerintahan desa	100 Persen	60.291.000,00	
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,	40 Orang	155.726.600,00	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,	40 Orang	81.768.000,00	Adanya Efisiensi Anggaran

	Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia			
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa				Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa				
	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4 Dokumen	52.204.300,00		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4 Dokumen	14.725.000,00	Adanya Efisiensi Anggaran
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa				Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa				
	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	4 Dokumen	54.153.900,00		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	4 Dokumen	22.790.000,00	Adanya Efisiensi Anggaran
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				
	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	2 Dokumen	43.448.400,00		Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	2 Dokumen	22.776.000,00	Adanya Efisiensi Anggaran
			14.207.550.555,00				**13.422.338.429,00**	

Penjelasan terhadap Rancangan Awal RKPD dengan RKPD Tahun 2025 Kecamatan Jayanti, ada perbedaan baik didalam nama kegiatan/sub kegiatan, indikator serta anggaran. Perbedaan tersebut dikarenakan adanya program efisiensi yang dilaksanakan mulai dari Pemerintah Pusat sampai Daerah, serta adanya kebutuhan yang memang mendesak dan harus dilaksanakan oleh Kecamatan. Serta sesuai dengan Kebutuhan Kecamatan.

2.2 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kecamatan Jayanti merupakan salah satu perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pemerintahan yang mengemban misi dari Kabupaten Tangerang yaitu : Meningkatkan penerapan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat menuju masyarakat yang religius. Dan Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan dan akuntabel.

Usulan program dan kegiatan yang ada di Kecamatan Jayanti, salah satunya didapatkan dari usulan Masyarakat melalui proses musrenbang, yang diawali dari musrenbang Desa kemudian diusulkan dimusrenbang Kecamatan yang telah dilakukan, Serta usulan berdasarkan kewenangan Kecamatan. Usulan tersebut sesuai dengan tugas dan fungsi kecamatan, Bahwa fungsi Kecamatan adalah menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat, mengelola fasilitas umum, mengembangkan ekonomi dan usaha daerah dan tugas-tugas lain yang dilimpahkan kepada daerah. dan berdasarkan prioritas pembangunan Kabupaten Tangerang yang terdiri dari Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia, Meningkatkan Perekonomian Masyarakat dan Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan.

Berikut hasil penelaahan program dan kegiatan masyarakat di wilayah pemerintahan Kecamatan Jayanti untuk tahun 2025 :

Tabel T-C.32
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Kabupaten Tangerang

No	Program// Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		**Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan**	100,00%	**7.334.080.942**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun**	6 Dokumen	**86.000.000**
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Jayanti	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	17.765.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Jayanti	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	43.220.000,00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Jayanti	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	25.015.000,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**Jumlah dokumen dokumen adminstrasi keuangan**	1 Dokumen	**4.629.881.443**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Jayanti	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/bulan	4.614.341.443,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKP	Kec. Jayanti	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	15.540.000,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		**Jumlah dokumen Pembinaan Pegawai**	1 Dokumen	**225.871.000**
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kec. Jayanti	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	152.111.000
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Jayanti	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	40 Orang	73.760.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		**Jumlah dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**8 Dokumen**	**658.473.500**
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Jayanti	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.840.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Jayanti	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	265.788.000
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kec. Jayanti	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	16.618.500
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Jayanti	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor	2 Peket	48.829.000
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec. Jayanti	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	78.410.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undanga	Kec. Jayanti	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Laporan	22.968.000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec. Jayanti	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Laporan	90.600.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Jayanti	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	124.420.000
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Jumlah Dokumen Jasa Penunjang**	3 Dokumen	**1.059.787.800**
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Jayanti	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	14.032.200
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Jayanti	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	136.599.600
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Jayanti	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	909.156.000
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**674.067.199**
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Jayanti	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	77.444.500

7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Jayanti	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	121.543.600
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Jayanti	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35 Unit	39.150.000
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Jayanti	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	435.929.099
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		**Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar**	100%	**45.614.500**
			Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara	**90%**	**2.966.750.650**
7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**		**Jumlah laporan pelayanan**	**1 Dokumen**	**45.614.500**
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Jayanti	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	45.614.500
7.01.02.2.03	**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**		**Jumlah dokumen pemeliharaan**	**1 Dokumen**	**2.966.750.650**
7.01.02.2.03.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kec. Jayanti	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	1 Dokumen	2.966.750.650
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		**Persentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan**	**100%**	**1.385.902.351**
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**		**Jumlah Laporan Pemberdayaan**	**2 Dokumen**	**1.385.902.351**
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. Jayanti	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5 Lembaga	66.718.900
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Jayanti	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1.319.183.451
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		**Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti**	**100%**	**77.270.000**
7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**		**Jumlah laporan gangguan trantibum**	**1 Dokumen**	**77.270.000**
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Jayanti	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	77.270.000
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**		**Persentase tertib administrasi pemerintahan desa**	**100%**	**156.680.000**
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		**Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**	**7 Dokumen**	**156.680.000**
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Jayanti	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4 Dokumen	61.740.000
07.01.06.2.01.02	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kec. Jayanti	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	4 Dokumen	53.200.000
7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kec. Jayanti	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	2 Dokumen	41.740.000
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		**Prosentase Program Penyelaengaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**100%**	**98.043.000**
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**		**Jumlah rekomendasi yang dikeluarkan**	2 Dokumen	**98.043.000**

7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kec. Jayanti	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	40 Orang	44.043.000
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec. Jayanti	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 Dokumen	54.000.000
					12.064.341.443,00

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Kedudukan rencana kerja adalah sebagai kerangka dasar dalam melaksanakan operasional tugas pokok dan fungsi organisasi perangkat daerah yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditentukan.

Untuk menginplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program tersebut, ditetapkan beberapa kegiatan, dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh Organisasi perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan kedalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya, adapun program dan kegiatan dalam perencanaan Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Jayanti adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
   A. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
      a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
      b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
      c. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   B. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
      a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
      b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
   C. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
      a. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
      b. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
   D. Administrasi Umum Perangkat Daerah
      a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
      b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
      c. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
      d. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
      e. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
      f. Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
      g. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
   E. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
      a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
      b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
      c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
   F. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
      a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
      b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

A. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
   a. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
B. Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
   a. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
   A. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
      a. Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
      b. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
   A. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
      a. Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
   A. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
      a. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
      b. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
   A. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
      a. Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
      b. Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
      c. Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
      d. Koordinasi Pendampingan desa diwilayahnya

Adapun Rencana Kerja dan Pendanaan Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Jayanti disajikan pada tabel berikut :

Tabel
Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Jayanti
Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				
				Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)		
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025
		Kecamatan Jayanti				**12.064.341.443,00**	**13.501.105.307,00**	**13.422.338.429,00**
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**12.064.341.443,00**	**13.501.105.307,00**	**13.422.338.429,00**
	7 01	**KECAMATAN**				**12.064.341.443,00**	**13.501.105.307,00**	**13.422.338.429,00**
1	**7 01 01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan**	**100 Persen**	**100 Persen**	**7.334.080.942,00**	**6.639.217.167,00**	**6.799.333.889,00**
	7 01 01 2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**	**6 Dokumen**	**3 Dokumen**	**86.000.000,00**	**69.600.000,00**	**69.600.000,00**
	7 01 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	17.765.000,00	17.765.000,00	12.260.000,00
	7 01 01 2.01 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	43.220.000,00	26.820.000,00	19.995.000,00
	7 01 01 2.01 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	25.015.000,00	25.015.000,00	24.775.000,00
	7 01 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN**	**1 Dokumen**	**20 Orang**	**4.629.881.443,00**	**4.442.818.739,00**	**4.442.818.739,00**
	7 01 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17 Orang/bulan	20 Orang/bulan	4.614.341.443,00	4.427.278.739,00	4.420.143.261,00
	7 01 01 2.02 0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						

						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	1 Laporan	15.540.000,00	15.540.000,00	14.430.000,00
	7	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan**	**1 Dokumen**	**1 Paket**	**225.871.000,00**	**108.347.000,00**	**108.347.000,00**
	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	40 Paket	1 Paket	152.111.000,00	51.245.000,00	51.245.000,00
	7	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	40 Orang	40 Orang	73.760.000,00	57.102.000,00	44.835.200,00
	7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan**	**8 Dokumen**	**1 Paket**	**658.473.500,00**	**481.979.800,00**	**481.979.800,00**
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	10.840.000,00	10.840.000,00	10.840.000,00
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	265.788.000,00	135.581.300,00	335.581.300,00
	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	16.618.500,00	20.870.500,00	20.870.500,00
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	48.829.000,00	32.544.000,00	32.544.000,00
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	78.410.000,00	34.190.000,00	25.820.000,00
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						

						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	4 Dokumen	22.968.000,00	82.968.000,00	82.968.000,00
	7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu					
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	90.600.000,00	74.200.000,00	58.797.000,00
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	2 Laporan	124.420.000,00	90.786.000,00	45.358.000,00
	7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat**	-	**12 Laporan**	**1.059.787.800,00**	**1.051.015.768,00**	**1.051.015.768,00**
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	14.032.200,00	9.832.200,00	9.832.200,00
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	136.599.600,00	112.134.000,00	112.134.000,00
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	909.156.000,00	929.049.568,00	991.449.568,00
	7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya**	**4 Dokumen**	**2 Unit**	**674.067.199,00**	**485.455.860,00**	**485.455.860,00**
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	2 Unit	77.444.500,00	70.622.884,00	70.622.884,00
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	7 Unit	121.543.600,00	156.182.976,00	156.182.976,00
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	30 Unit	39.150.000,00	28.650.000,00	28.650.000,00

	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	435.929.099,00	230.000.000,00	230.000.000,00
2	**7**	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara**	**-**	**100 90 Persen Persen**	**3.012.365.150,00**	**4.646.728.240,00**	**4.699.298.040,00**
	7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan**	**-**	**4 Dokumen**	**45.614.500,00**	**41.497.800,00**	**41.497.800,00**
	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan						
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3 Laporan	3 Laporan	45.614.500,00	41.497.800,00	31.737.600,00
	7	**01**	**02**	**2.03**		**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**	**Jumlah Dokumen Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**	-	**1 Dokumen**	**2.966.750.650,00**	**4.605.230.440,00**	**4.605.230.440,00**
	7	01	02	2.03	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum						
							Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	4 Dokumen	4 Dokumen	2.966.750.650,00	4.605.230.440,00	4.667.560.440,00
3	**7**	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan**	**100 Persen**	**100 Persen**	**1.385.902.351,00**	**1.734.301.900,00**	**1.541.298.500,00**
	7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan**	**2 Dokumen**	**2 Dokumen**	**1.385.902.351,00**	**1.734.301.900,00**	**1.734.301.900,00**
	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	66.718.900,00	69.800.900,00	69.800.900,00

	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan					
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	1.319.183.451,00	1.664.501.000,00	1.471.497.600,00
4	**7**	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti**	-	**100 Persen**	**77.270.000,00**	**88.050.000,00**	**63.975.000,00**
	7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan**	-	**4 Laporan**	**77.270.000,00**	**88.050.000,00**	**88.050.000,00**
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan						
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	4 Laporan	77.270.000,00	88.050.000,00	63.975.000,00
5	**7**	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti**	**100 Persen**	**100 Persen**	**98.043.000,00**	**311.040.000,00**	**258.142.000,00**
	7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia**	**40 Orang**	**40 Orang**	**98.043.000,00**	**311.040.000,00**	**311.040.000,00**
	7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia						

						Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	40 Orang	40 Orang	44.043.000,00	267.740.000,00	226.496.000,00
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan					
						Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen	54.000.000,00	43.300.000,00	31.646.000,00
6	**7**	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase tertib administrasi pemerintahan desa**	**-**	**100 Persen**	**156.680.000,00**	**81.768.000,00**	**60.291.000,00**
	7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi** **Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia**	**7 Dokumen**	**40 Orang**	**156.680.000,00**	**81.768.000,00**	**81.768.000,00**
	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa					
						Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4 Dokumen	4 Dokumen	61.740.000,00	20.300.000,00	14.725.000,00
	7	01	06	2.01	0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa					
						Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	4 Dokumen	4 Dokumen	53.200.000,00	29.340.000,00	22.790.000,00
	7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa					
						Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan	2 Dokumen	2 Dokumen	41.740.000,00	32.128.000,00	22.776.000,00

			Daerah dengan Pembangunan Desa					
					J U M L A H	**12.064.341.443,00**	**13.501.105.307,00**	**13.422.338.429,00**

Pada perubahan Anggaran yang terjadi pada tahun 2025 tidak adanya perubahan target kinerja hanya saja berubahan pada anggaran kegiatannya saja, dikarenakan yang berubah efisiensi yang dilaksanakan seluruh Perangkat Daerah, dan adanya Pokok Pikiran Rakyat yang dimasukan kedalam perubahan. Serta terkait honorarium ke-13 dan THR bagi pegawai Non PNS dan efisiensi rapat-rapat atau kegiatan yang dilaksanakan di luar kantor Kecamatan.

BAB IV
PENUTUP

Dalam pelaksanaan penyusunan serta penetapan berbagai program dan kegiatan pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan yang diukur berdasarkan sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Renstra Kecamatan Jayanti tahun 2024 - 2026. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran yang tertuang dalam Renstra Kecamatan Jayanti harus menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektivitas, tranparansi dan akuntabilitas.

Guna memperoleh optimalisasi pencapaian hasil, pada pelaksanaan program/kegiatan yang di laksanakan di Kecamatan Jayanti, bik dalam rangka regulasi maupun mensyaratkan keterpaduan dan singkronisasi antar kegiatan antara kegiatan dalam stu program maupun kegiatan antar program.

Untuk memperoleh keterpaduan dan singkronisasi dalam pelaksanaan program/kegiatan yang telah direncanakan, harus melalui proses musyawarah antar pelaku pembangunan melalui tahap forum musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) agar program/kegiatan terintegrasi baik antar kegiatan dan program.

Beberapa kaidah pelaksanaan Renja Kecamatan Jayanti Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Kecamatan Jayanti berkewajiban untuk mengimplementasikan pencapaian Program dan Kegiatan yang telah dirumuskan dalam Renja Kecamatan Jayanti Tahun 2025 sebagai tahapan pencapaian Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Tahun 2024-2026.
2. Atas dasar Renja, Kecamatan Jayanti berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2023 memperhatikan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2025.
3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renja Kecamatan Jayanti Tahun 2025, wajib melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan Tahun 2025.
4. Sekretariat dan seksi-seksi agar mendukung pencapaian target-target Renja dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum pada Renja sesuai ketentuan.
5. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan seksi-seksi dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja ini dapat tercapai.
6. Renja ini akan dijabarkan dalam Program Kerja (Progja) Tahun 2025 baik di tingkat unit kerja maupun di tingkat OPD. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan program dan kegiatan, maka Penyusunan Progja berpedoman pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan searah dengan Renja.
7. Dalam melaksanakan Renja ini agar memperhatikan kaidah-kaidah hukum untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan pemerintahan daerah dan menghindari terjadinya permasalahan hukum dikemudian hari.
8. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian

target-target Renstra, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.

9. Pengawasan, Pengendalian, dan Evaluasi di tingkat pelaksanaan dilakukan secara berjenjang mulai dari kepala seksi/kepala sub bagian hingga Camat dan melekat pada masing-masing unsur satuan unit kerja.
10. Pengendalian dan Evaluasi Renja ini dilakukan dengan tertib dan obyektif serta disampaikan dalam bentuk laporan dari masing-masing aparatur yang terintegrasi dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Kecamatan Jayanti.
11. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra terlebih dahulu yang selanjutnya dilakukan perubahan terhadap Renja sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Rencana Tindak Lanjut Kecamatan Jayanti akan memudahkan jajaran aparatur dan masyarakat Kecamatan Jayanti untuk memahami dan menilai program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahun, sehingga dengan demikian akan terwujud akuntabilitas Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Jayanti. Apabila dapat terwujud akuntabilitas kegiatan- kegiatan yang dilaksanakan diharapkan pemerintahan yang baik akan terwujud di Kecamatan Jayanti.

Diharapkan bahwa keberadaan Renja Kecamatan Jayanti Tahun 2025 akan mampu mendukung kelancaran dan keberhasilan pelaksanaantugas pokok dan fungsi Kecamatan Jayanti pada khususnya serta dapat memberikan manfaat bagi proses perencanaan pembangunan Kabupaten Tangerang pada umumnya.

51. Kecamatan Kemiri

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kecamatan KEMIRI Menyusun Perubahan Renja Kecamatan KEMIRI Tahun 2025 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan KEMIRI. Perubahan Renja Kecamatan KEMIRI Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Renstra Kecamatan KEMIRI Tahun 2021-2026 dan mengacu pada Perubahan RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2025.

Perubahan Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan RKA Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Perubahan Renja

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan KEMIRI tahun 2023 didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Tingkat I Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) ;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287) ; sebagaiman telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perokonomian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516) ;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

4310); sebagaiman telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perokonomian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516) ;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); sebagaiman telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan Disease dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perokonomian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516) ;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700) ;

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar menjadi Kabupaten Tangerang Provinsi BantenSelatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah no 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312)
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodfikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan keuangan daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 288);
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050 - 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Daerah Provinsi Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2009-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 113);

24. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bantenselatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi BantenSelatan Tahun 2021 Nomor 6);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan KEMIRI (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2007 Nomor 16);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tangerang Tahun 2005 – 2025 Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2009 Nomor 10);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2011 Nomor 3);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang Tahun 2012 – 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2012 Nomor 05);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 47);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 81Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan KEMIRI (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2020 Nomor 529, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Nomor 47)
31. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tangerang 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2021 Nomor)
32. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 60 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 Nomor 847)

1.3.Maksud dan Tujuan

Perubahan Rencana kerja Kecamatan KEMIRI Tahun 2025 disusun dengan maksud untuk :

1. Menetapkan kebijakan, Perubahan program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan periode Tahun 2025 yang mengacu visi, misi dan program Kabupaten Tangerang guna mendorong partisipasi aparatur dan masyarakat di wilayah Kecamatan KEMIRI;
2. Menetapkan pedoman dalam penyusunan Perubahan program, kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan KEMIRI Tahun 2025;
3. Mewujudkan sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan daerah antara Perubahan Renja Kecamatan KEMIRI dengan Perubahan RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2025.

Adapun tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan KEMIRI untuk memberikan arahan sekaligus pedoman bagi unit kerja

dalam lingkup Kecamatan KEMIRI dalam melaksanakan pembangunan guna mewujudkan visi dan misi Kabupaten Tangerang sesuai Rencana Strategis Kecamatan KEMIRI Tahun 2021 – 2026

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan KEMIRI Tahun 2025 disusun berdasarkan sistematika berikut :

Bab I Pendahuluan

Berisi Latar Belakang penyusunan Renja ini, dasar hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika pembahasan.

Bab II Evaluasi Renja Kecamatan KEMIRI Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025 Memuat : (1) kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelasksanaan Renja Kecamatan KEMIRI tahun lalu dan perkiraan capaian tahun

berjalan, (2) analisis kinerja pelayanan OPD, (3) isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD,

Bab III Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah

Berisikan Rencana Kerja Kecamatan KEMIRI terdiri dari Rencana Program, Rencana Kegiatan dan Sub Kegiatan serta indikator kinerja

Bab IV Penutup

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, serta kaidah-kaidah pelaksanaan, dan Rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I (TAHUN BERJALAN)

2.1 Evaluasi Renja Kecamatan KEMIRI sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

Pelaksanaan evaluasi ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan Kecamatan KEMIRI Kabupaten Tangerang dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Rencana Kerja SKPD sampai dengan triwulan I tahun 2025, serta mengetahui hambatan dan permasalahan yang dihadap

Berikut ini akan diuraikan mengenai kajian (review) tehadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan KEMIRI Triwulan I Tahun Anggaran 2025 serta progres pencapaian kinerja, sehingga dapat teridentifikasi sampai sejauh mana Kecamatan KEMIRI Kabupaten Tangerang telah melaksanakan program dan kegiatannya. Anggaran Kecamatan KEMIRI tahun 2025 sebesar Rp 14.530.081.141,00,- dengan realisasi keuangan sampai dengan 31 Maret 2025 (Triwulan I) ini sebesar Rp 2.165.820.241,00,- dengan persentase capaian keuangan 14,91 % (sangat rendah) dan rata-rata capaian kinerja sebesar 18,84 % (sangat rendah). Sesuai dengan tabel berikut ini.

Tabel 2.1
Evaluasi Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025 Kabupaten Tangerang

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Capaian (%)	Realisasi Fisik Kegiatan (%)	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Satuan
1	2	3	4	5= (4/3)*100	6	7	8
7.01	**KECAMATAN**						
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.870.399.316	1.705.883.541	21.67 %	100.00 %	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	%
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	398.463.500	53.544.000	13.44 %	100.00 %	prosentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen
7.01.01.2.01.0001	*Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	156.943.500	29.444.000	18.76 %	100.00 %	meningkatnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen
7.01.01.2.01.0006	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	120.120.000	6.000.000	5.00 %	100.00 %	meningkatnya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen
7.01.01.2.01.0007	*Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	121.400.000	18.100.000	14.91 %	100.00 %	meningkatnya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.159.050.248	1.204.131.745	23.34 %	100.00 %	prosentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai
7.01.01.2.02.0001	*Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	4.996.790.248	1.175.231.745	23.52 %	100.00 %	meningkatnya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/tahun
7.01.01.2.02.0007	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD*	162.260.000	28.900.000	17.81 %	100.00 %	meningkatnya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dokumen
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	140.035.000	0	0.00 %	0.00 %	prosentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah
7.01.01.2.05.0002	*Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya*	58.995.000	0	0.00 %	0.00 %	meningkatnya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Orang/tahun
7.01.01.2.05.0011	*Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*	81.040.000	0	0.00 %	0.00 %	meningkatnya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Orang/tahun
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	583.972.800	130.046.000	22.27 %	100.00 %	prosentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah

7.01.01.2.06.0001	*Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*	13.531.200	0	0.00 %	0.00 %	meningkatnya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Unit	12	12	100.00 %	Kecamatan Kemiri
7.01.01.2.06.0002	*Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	279.635.600	46.303.000	16.56 %	100.00 %	meningkatnya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	Unit	12	12	100.00 %	Kecamatan Kemiri

1	2	3	4	5= (4/3)*100	6	7	8	9	10	11= (10/9)*100	12
7.01.01.2.06.0004	*Penyediaan Bahan Logistik Kantor*	25.400.000	25.400.000	100.00 %	100.00 %	meningkatnya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Produk	12	12	100.00 %	Kecamatan Kemiri
7.01.01.2.06.0005	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	104.836.000	27.743.000	26.46 %	100.00 %	meningkatnya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Produk	12	12	100.00 %	Kecamatan Kemiri
7.01.01.2.06.0008	*Fasilitasi Kunjungan Tamu*	98.254.000	30.600.000	31.14 %	100.00 %	meningkatnya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Orang/tahun	200	200	100.00 %	Kecamatan Kemiri
7.01.01.2.06.0009	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	62.316.000	0	0.00 %	0.00 %	meningkatnya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Orang	300	300	100.00 %	Kecamatan Kemiri
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.130.580.368	276.410.196	24.45 %	100.00 %	prosentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Orang	38	38	100.00 %	Kecamatan Kemiri
7.01.01.2.08.0002	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	209.530.800	46.675.000	22.28 %	100.00 %	meningkatnya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Angka	12	12	100.00 %	Kecamatan Kemiri
7.01.01.2.08.0004	*Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	921.049.568	229.735.196	24.94 %	100.00 %	meningkatnya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Orang/tahun	38	38	100.00 %	Kecamatan Kemiri
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	458.297.400	41.751.600	9.11 %	100.00 %	prosentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Unit	6	6	100.00 %	Kecamatan Kemiri
7.01.01.2.09.0001	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan*	124.641.000	0	0.00 %	0.00 %	meningkatnya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	6	6	100.00 %	Kecamatan Kemiri
7.01.01.2.09.0002	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	167.006.400	41.751.600	25.00 %	100.00 %	meningkatnya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	6	6	100.00 %	Kecamatan Kemiri
7.01.01.2.09.0006	*Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	16.650.000	0	0.00 %	0.00 %	meningkatnya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	5	5	100.00 %	Kecamatan Kemiri
7.01.01.2.09.0010	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	150.000.000	0	0.00 %	0.00 %	meningkatnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	2	2	100.00 %	Kecamatan Kemiri

7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4.703.682.825	0	0.00 %	0.00 %	Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar	%	91.7	91.7	100.00 %	Kecamatan Kemiri
						Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara	%	100	100	100.00 %	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja	33.810.500	0	0.00 %	0.00 %	prosentase penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit	Dokumen	7	7	100.00 %	Kecamatan Kemiri

(%)

1	2	3	4	5= (4/3)*100	6	7	8	9	10	11= (10/9)*100	12
7.01.02.2.02.0003	*Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	33.810.500	0	0.00 %	0.00 %	meningkatnya Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Orang/tahun	7	7	100.00 %	Kecamatan Kemiri
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	4.669.872.325	0	0.00 %	0.00 %	prosentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Unit	35	35	100.00 %	Kecamatan Kemiri
7.01.02.2.03.0001	*Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum*	4.669.872.325	0	0.00 %	0.00 %	meningkatnya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Unit	35	35	100.00 %	Kecamatan Kemiri
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.254.380.000	404.707.700	32.26 %	100.00 %	Prosentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	%	100	100	100.00 %	Kecamatan Kemiri
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1.254.380.000	404.707.700	32.26 %	100.00 %	prosentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kelompok	7	7	100.00 %	Kecamatan Kemiri
7.01.03.2.01.0001	*Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa*	117.493.500	116.693.500	99.32 %	100.00 %	meningkatnya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Desa	7	7	100.00 %	Kecamatan Kemiri
7.01.03.2.01.0003	*Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	1.136.886.500	288.014.200	25.33 %	100.00 %	meningkatnya Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Desa	7	7	100.00 %	Kecamatan Kemiri
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	150.305.500	30.164.000	20.07 %	100.00 %	Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	%	100	100	100.00 %	Kecamatan Kemiri
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	150.305.500	30.164.000	20.07 %	100.00 %	prosentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah	7	7	100.00 %	Kecamatan Kemiri

7.01.04.2.01.0001	*Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan*	150.305.500	30.164.000	20.07 %	100.00 %	meningkatnya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelompok	2	2	100.00 %	Kecamatan Kemiri
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	413.858.500	0	0.00 %	0.00 %	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	%	89.50	89.50	100.00 %	Kecamatan Kemiri
						Persentase tertib administrasi pemerintahan desa	%	100	100	100.00 %	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	413.858.500	0	0.00 %	0.00 %	prosentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Dokumen	7	7	100.00 %	Kecamatan Kemiri
1	2	3	4	5= (4/3)*100	6	7	8	9	10	11= (10/9)*100	12
	Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara					rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara					
7.01.05.2.01.0008	*Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan*	43.630.000	0	0.00 %	0.00 %	meningkatnya Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Desa	7	7	100.00 %	Kecamatan Kemiri
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	137.455.000	25.065.000	18.24 %	100.00 %	Persentase pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa	%	100	100	100.00 %	Kecamatan Kemiri
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	137.455.000	25.065.000	18.24 %	100.00 %	prosentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Desa	7	7	100.00 %	Kecamatan Kemiri
7.01.06.2.01.0002	*Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa*	59.610.000	13.115.000	22.00 %	100.00 %	meningkatnya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	7	7	100.00 %	Kecamatan Kemiri
7.01.06.2.01.0017	*Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya*	77.845.000	11.950.000	15.35 %	100.00 %	meningkatnya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Desa	7	7	100.00 %	Kecamatan Kemiri

Dari tabel diatas ini dapat diketahui bahwa Kecamatan KEMIRI Kabupaten Tangerang pada melaksanakan 6 Program, 12 Kegiatan dan 28 Sub Kegiatan. Dari 28 Sub kegiatan, 6 sub kegiatan sudah mencapai target dan 28 sub kegiatan belum mencapai target.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan KEMIRI

Wilayah Kecamatan KEMIRI terdiri dari 7 Desa serta kondisi demografis penduduk yang beraneka ragam sangat dimungkinkan perkembangan pembangunan di Kecamatan KEMIRI lebih cepat di banding kecamatan lainnya sehingga menuntut pihak kecamatan untuk bisa bergerak luwes mengikuti perkembangan keadaan masyarakat baik itu dalam bidang pelayanan, ekonomi maupun sarana dan prasarana yang menunjang dalam kegiatan pendayagunaan aparatur dan masyarakat itu sendiri

Untuk analisis kinerja pelayanan ini disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan KEMIRI Tahun 2025 (Triwulan I)

No	Indikator Kinerja Utama OPD	Target Kinerja Capaian Renstra (2023)	Realisasi /Capaian Kinerja Capaian Rensrta tahun berjalan	Catatan Analisis
1	2	3	4	5
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	80 %		Realisasi Belum tercapai karena penilaian masih sampai triwulan Itahun Berjalan

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran dapat dilakukan dengan berbagai cara diantaranya dengan disusunnya Renja sebagai sebuah rangkaian cara untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan yang akan ditetapkan.

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan KEMIRI bahwa ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut :

1) Tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan

SKPD Berdasarkan hasil evaluasi indikator kinerja pelayanan SKPD Kecamatan KEMIRI untuk cukup baik terlihat dari capaian indikator peninkatan pelayanan ditingkat kecamatan sudah tercapai yaitu 15 Menit untuk tahun 2025.

2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam

menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD.
Permasalahan utama yang terdapat dalam pelaksanaan tugas kinerja SKPD adalah kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, serta kurangnya Optimalisasi partisipasi masyarakat dalam kegiatan kegiatan yang berhubungan dengan Perencanaan Pembangunan .

3) Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala Daerah, terhadap capaian pogram nasional seperti SPM dan SDGs (Development Goals) Pencapaian Program Kerja Kecamatan KEMIRI sebagai penjabaran visi misi kabupaten Tangerang.
4) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan
   - Mewujudkan ketersediaan data / informasi sebagai upaya dukungan terhadap penyusunan dokumen perencanaan
   - Mensinergikan antara perencanaan dan pelaksanaan agar dapat tercapai target indikator yang telah direncanakan
   - Peningkatan pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan KEMIRI terdiri dari Rencana Program, Rencana Kegiatan dan Sub Kegiatan serta indikator kinerja yang akan dilaksanakan untuk Tahun Anggaran 2025.

Program Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan kumpulan kegiatan, dan sub kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran yang ditetapkan di tingkat satuan kerja dalam menunjang pencapaian sasaran di tingkat Kabupaten.

Pendanaan merupakan rencana alokasi anggaran yang bersifat indikasi dan dapat disesuaikan jika diperlukan. Sumber Perubahan pendanaan pada Kecamatan KEMIRI untuk tahun 2025 berasal dari Perubahan APBD Kabupaten Tangerang. Dengan demikian besarannya menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Untuk lebih jelasnya, Perubahan Rencana Kerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Indikator Kinerja, dan Pendanaan Indikatif diuraikan dalam Tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1 Perubahan Rencana Kerja Kecamatan KEMIRI Tahun 2025

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Capaian Target	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Capaian Target	Pagu Indikatif	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	KECAMATAN					Kecamatan					
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
7.01.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
7.01.01.2.01.0001	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Kemiri	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	156.943.500,00	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Kemiri	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	156.943.500,00	
7.01.01.2.01.0006	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Kemiri	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	120.120.000,00	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Kemiri	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	128.520.000,00	
7.01.01.2.01.0007	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Kemiri	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	121.400.000,00	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Kemiri	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	128.520.000,00	
7.01.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
7.01.01.2.02.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Kemiri	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35	4.996.790.248,00	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Kemiri	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37	4.810.328.006,00	
7.01.01.2.02.0007	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Kec. Kemiri	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/	2	162.260.000,00	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Kec. Kemiri	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/	1	162.260.000,00	

	Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			
7.01.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					
7.01.01.2.05.0002	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kec. Kemiri	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	22	58.995.000,00	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kec. Kemiri	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	50	58.995.000,00	
7.01.01.2.05.0011	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Kemiri	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50	81.040.000,00	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Kemiri	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	45	81.040.000,00	
7.01.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah					Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah					
7.01.01.2.06.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Kec. Kemiri	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5	13.531.200,00	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Kec. Kemiri	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	13.531.200,00	
7.01.01.2.06.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Kemiri	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9	279.635.600,00	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Kemiri	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	279.635.600,00	

7.01.01.2.06.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Kemiri	Jumlah Paket Bahan Logistik	24	25.400.000,00	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Kemiri	Jumlah Paket Bahan Logistik	24	25.400.000,00	
			Kantor yang Disediakan					Kantor yang Disediakan			
7.01.01.2.06.0005	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec. Kemiri	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4	24.193.000,00	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec. Kemiri	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7	24.193.000,00	
7.01.01.2.06.0008	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec. Kemiri	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	24	109.354.000,00	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec. Kemiri	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	24	98.254.000,00	
7.01.01.2.06.0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Kemiri	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2	135.566.000,00	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Kemiri	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2	62.316.000,00	
7.01.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
7.01.01.2.08.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Kemiri	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	0	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Kemiri	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0	0	

7.01.01.2.08.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Kemiri	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3	209.530.800,00	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Kemiri	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2	209.530.800,00	
7.01.01.2.08.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Kemiri	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	15	921.049.568,00	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Kemiri	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	1.009.849.568,00	
7.01.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
7.01.01.2.09.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Kemiri	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6	152.641.000,00	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Kemiri	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5	124.641.000,00	
7.01.01.2.09.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Kemiri	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1	167.006.400,00	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Kemiri	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2	167.006.400,00	
7.01.01.2.09.0006	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Kemiri	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4	16.650.000,00	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Kemiri	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7	16.650.000,00	

7.01.01.2.09.0009	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Kemiri	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	150.000.000,00	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Kemiri	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	150.000.000,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					
7.01.02.2.02	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan					Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan					
7.01.02.2.02.0003	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Kemiri	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2	33.810.500,00	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Kemiri	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2	33.810.500,00	
7.01.02.2.03	Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum					Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum					
7.01.02.2.03.0001	Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat	Kec. Kemiri	Jumlah dokumen koordinasi/siner	40	5.088.058.000,00	Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan	Kec. Kemiri	Jumlah dokumen koordinasi/siner	1	4.914.872.325,00	
	Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum		gi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum			Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum		gi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum			
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					
7.01.03.2.01	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa					Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa					

7.01.03.2.01.001	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. Kemiri	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10	117.493.500,00	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. Kemiri	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10	117.493.500,00	
7.01.03.2.01.003	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Kemiri	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10	1.136.886.500,00	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Kemiri	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1	1.136.886.500,00	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					
7.01.04.2.01	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					
7.01.04.2.01.0001	Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Kemiri	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	5	150.305.500,00	Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Kemiri	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4	150.305.500,00	

7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
7.01.05.2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

7.01.05.2.01.0001	Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kec. Kemiri	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	50	370.228.500,00	Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kec. Kemiri	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	40	370.228.500,00	
7.01.05.2.01.0008	Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec. Kemiri	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	3	43.630.000,00	Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec. Kemiri	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	7	43.630.000,00	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					
7.01.06.2.01	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					
7.01.06.2.01.0002	Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Kemiri	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka	7	59.610.000,00	Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata	Kec. Kemiri	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka	7	59.610.000,00	

			Administrasi Tata Pemerintahan Desa			Pemerintahan Desa		Administrasi Tata Pemerintahan Desa			
7.01.06.2.01.0017	Sub Kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kec. Kemiri	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	7	77.845.000,00	Sub Kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kec. Kemiri	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	0	77.845.000,00	

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan KEMIRI Tahun 2025 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Kecamatan KEMIRI Tahun 2025-2026, yang memuat antara lain evaluasi atas pelaksanaan rencana kerja, telaahan terhadap kebijakan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan KEMIRI, tujuan dan sasaran renja Kecamatan, serta program dan kegiatan.

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan KEMIRI Tahun 2025 akan menjadi acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Kecamatan KEMIRI Tahun 2025 dengan mempertimbangkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Perubahan Tahun 2025.

Untuk menjaga efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program, setiap unit kerja dalam lingkup Kecamatan KEMIRI wajib melakukan pengendalian dan evaluasi atas hasil pelaksanaan rencana kerja Kecamatan KEMIRI ini. Hasil evaluasi ini menjadi bahan bagi penyusunan perubahan rencana kerja dan anggaran Kecamatan KEMIRI Tahun 2025.

52. Kecamatan Sukadiri

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) merupakan bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam ketentuan tersebut, setiap Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Renja PD sebagai pedoman kerja tahunan yang berfungsi untuk menerjemahkan dokumen perencanaan strategis lima tahunan, yaitu Rencana Strategis (Renstra) PD, ke dalam rencana tahunan yang bersifat operasional dan terukur.

Secara substansial, Renja Kecamatan Sukadiri memiliki kedudukan strategis dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah, karena merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan, sasaran, dan program Kecamatan Sukadiri. Dokumen ini disusun selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tangerang, sehingga memastikan keterpaduan antara perencanaan kecamatan dan prioritas pembangunan daerah.

Renja PD juga memiliki peran penting sebagai dasar perumusan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan. Selain itu, dokumen ini berfungsi sebagai instrumen evaluasi untuk mengukur tingkat pencapaian kinerja Perangkat Daerah setiap tahunnya, sekaligus menjadi tolok ukur akuntabilitas pelaksanaan program dan kegiatan.

Dalam rangka menjamin kualitas dan keterpaduan dokumen perencanaan, proses penyusunan Renja PD dilakukan berdasarkan ketentuan dalam:

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Seiring dengan dinamika pembangunan dan perubahan kebijakan pemerintah daerah, penyusunan Renja Perubahan PD menjadi kebutuhan yang mendesak untuk menyesuaikan rencana program dan kegiatan dengan kondisi aktual. Oleh karena itu, penyusunan rancangan Renja Perubahan dilakukan dengan mengacu pada rancangan perubahan RKPD, serta memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan capaian kinerja yang telah dicapai. Proses ini dilaksanakan secara paralel dengan penyusunan dokumen perubahan RKPD untuk menjamin keselarasan dan konsistensi perencanaan pada semua tingkatan.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438).
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
5. sebagaimana telah diubah terakhir dengan:
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438).
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010).

2. Peraturan Pemerintah

1. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826).

3. Peraturan Presiden / Instruksi Presiden

1. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

4. Peraturan Menteri

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan:
2. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

5. Peraturan Daerah

1. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 11).

6. Surat Edaran

1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/200/II/BANGDA/2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Sukadiri dimaksudkan untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan sebagai tolak ukur serta alat bantu bagi seluruh unit kerja di lingkungan Kecamatan Sukadiri dalam melaksanakan tugasnya secara konsekuen dan konsisten. Dokumen ini berfungsi sebagai pedoman dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing unit kerja, guna mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.

Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Perubahan ini adalah untuk mengevaluasi Rencana Kerja Murni Tahun 2025 yang telah disusun sebelumnya, serta merumuskan kembali program dan kegiatan dengan melakukan penyesuaian terhadap dinamika dan kebutuhan aktual pembangunan. Dengan demikian, seluruh program dan kegiatan yang dirancang diharapkan dapat lebih tepat sasaran dan selaras dengan tugas serta fungsi Kecamatan Sukadiri pada Tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan secara ringkas tentang latar belakang renja PD, proses penyusunan, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU

Menguraikan hasil evaluasi anggaran dan capaian kinerja renja tahun 2025

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Menguraikan rencana kerja dan pendanaan perubahan Kecamatan Sukadiri Tahun Anggaran 2025.

BAB IV PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Sukadiri

Evaluasi pelaksanaan merupakan salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah. Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II mengacu pada APBD tahun berjalan selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan.

Hasil evaluasi Renja Kecamatan Sukadiri tahun 2025 sampai dengan Triwulan II Tahun 2025, adalah sebagaimana tabel 2.1.1 berikut:

KODE REKENING	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	%
				Jumlah (Rp)	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA**	**8.839.150.121,00**	**1.916.828.168,00**	**6.922.321.953,00**	**21,69**
7.01.01.2.01	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	98.257.000,00	23.090.000,00	75.167.000,00	23,50
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	49.595.000,00	7.050.000,00	42.545.000,00	14,22
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16.668.000,00	7.181.000,00	9.487.000,00	43,08
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	31.994.000,00	8.859.000,00	23.135.000,00	27,69
7.01.01.2.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	6.045.418.995,00	1.562.671.709,00	4.482.747.286,00	25,85
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.022.396.995,00	1.554.459.209,00	4.467.937.786,00	25,81
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	23.022.000,00	8.212.500,00	14.809.500,00	35,67
7.01.01.2.05	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	158.447.820,00	14.340.000,00	144.107.820,00	9,05
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	111.116.000,00	14.340.000,00	96.776.000,00	12,91
7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	47.331.820,00	0,00	47.331.820,00	0,00
7.01.01.2.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	564.880.770,00	55.333.540,00	509.547.230,00	9,80
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasirnnListrik/Penerangan Bangunan Kantor	18.589.000,00	0,00	18.589.000,00	0,00
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	343.858.400,00	0,00	343.858.400,00	0,00
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	18.192.100,00	0,00	18.192.100,00	0,00
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	17.764.520,00	17.764.520,00	0,00	100,00
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	54.933.750,00	12.724.020,00	42.209.730,00	23,16
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	61.020.000,00	15.255.000,00	45.765.000,00	25,00
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50.523.000,00	9.590.000,00	40.933.000,00	18,98
7.01.01.2.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.034.205.568,00	239.531.343,00	794.674.225,00	23,16
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.372.400,00	1.250.000,00	7.122.400,00	14,93
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	175.593.600,00	26.281.343,00	149.312.257,00	14,97
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	850.239.568,00	212.000.000,00	638.239.568,00	24,93
7.01.01.2.09	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	937.939.968,00	21.861.576,00	916.078.392,00	2,33
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	72.299.984,00	9.881.080,00	62.418.904,00	13,67

7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	126.339.984,00	11.980.496,00	114.359.488,00	9,48
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	39.300.000,00	0,00	39.300.000,00	0,00
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	500.000.000,00	0,00	500.000.000,00	0,00
7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	3.611.136.760,00	162.383.000,00	3.448.753.760,00	4,50
7.01.02.2.02	PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN	35.199.260,00	3.257.000,00	31.942.260,00	9,25
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	35.199.260,00	3.257.000,00	31.942.260,00	9,25
7.01.02.2.03	KOORDINASI PEMELIHARAAN PRASARANA DAN SARANA PELAYANAN UMUM	3.575.937.500,00	159.126.000,00	3.416.811.500,00	4,45
7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	3.575.937.500,00	159.126.000,00	3.416.811.500,00	4,45
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**1.213.003.400,00**	**440.951.000,00**	**772.052.400,00**	**36,35**
7.01.03.2.01	KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA	1.093.202.000,00	440.951.000,00	652.251.000,00	40,34
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	68.776.000,00	68.776.000,00	0,00	100,00
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1.024.426.000,00	372.175.000,00	652.251.000,00	36,33
7.01.03.2.03	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN TINGKAT KECAMATAN	119.801.400,00	0,00	119.801.400,00	0,00
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	108.269.400,00	0,00	108.269.400,00	0,00
7.01.03.2.03.0005	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	11.532.000,00	0,00	11.532.000,00	0,00
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**114.430.900,00**	**8.973.000,00**	**105.457.900,00**	**7,84**
7.01.04.2.01	KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	114.430.900,00	8.973.000,00	105.457.900,00	7,84
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	114.430.900,00	8.973.000,00	105.457.900,00	7,84
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**262.482.280,00**	**0,00**	**262.482.280,00**	**0,00**
7.01.05.2.01	PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH	262.482.280,00	0,00	262.482.280,00	0,00
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahunrnn1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	204.154.200,00	0,00	204.154.200,00	0,00
7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	11.468.080,00	0,00	11.468.080,00	0,00
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	46.860.000,00	0,00	46.860.000,00	0,00
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**106.749.400,00**	**5.450.000,00**	**101.299.400,00**	**5,11**
7.01.06.2.01	FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASINNPEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	106.749.400,00	5.450.000,00	101.299.400,00	5,11
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	106.749.400,00	5.450.000,00	101.299.400,00	5,11
	JUMLAH BELANJA DAERAH	**14.146.952.861,00**	**2.534.585.168,00**	**11.612.367.693,00**	**17,92**

Pada triwulan 1I 2025 realisasi anggaran kecamatan sukadiri sebesar

Rp 2.534.585.168. dari total pagu anggaran Rp. 14.146.952.861 atau dengan realisasi sebesar 17,92% namun ada satu Gu yang pengajuan SP2d realisasi atau di buku kas umumkan pada triwulan 2 sebesar Rp. 146.620.466, secara pelaksanaan semua kegiatan di triwulan 1 sudah terlaksana dengan anggaran kas triwulan 1 Rp.2.882.601.589 dengan ada kelebihan anggaran kas gaji beserta tunjangan dan beberapa kegiatan belanja.

Tabel 2.1.2

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten

Renja Perangkat Daerah Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang

Periode Pelaksanaan: sampai dengan TW II Tahun 2025

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3) 202	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (n-2) 2025			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Kinerja Renja PD Tahun (n-2) 2025	Realisasi Kinerja Renja PD Tahun (n-2) 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2026)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100,00 %**	**100%**	**300%**	**300%**
7.01.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7	6	6	6	100,00%	6	**18**	**257%**

7.01.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan	1	1	1	1	100,00%	1	**3**	**300%**
7.01.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang difasilitas	26	26	26	26	100,00%	26	**78**	**300%**
7.01.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	6	6	6	6	100,00%	8	**20**	**333%**
7.01.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang	3	3	3	3	100,00%	3	**9**	**300%**
7.01.01.2.09	Kegiatan :Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5	5	5	5	100,00%	5	**15**	**300%**
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik Kecamatan Sukadiri**	**93%**	**85%**	**100%**	**100%**	**100%**	**91%**	**276%**	**303%**
		Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar Kecamatan Sukadiri	**100%**	**87%**	**86,62 %**	**87%**	**100%**	**100%**	**273%**	**273%**
7.01.02.2.02	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja PerangkatDaerah yang Ada di Kecamatan	Tersedianya pemenuhan sarana dan prasarana Paten di Kecamatan	6	1	1	1	100%	3	**5**	**83%**
7.01.02.2.03	Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah infrastruktur yang dipelihara	45	8	8	8	100%	45	**61**	**136%**
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaa Kec. Sukadiri**	**89%**	**75%**	**88,%**	**89,5%**	**100%**	**89,5%**	**252%**	**283%**
7.01.03.2.01	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan/pemberdayaan	10	8	8	8	100%	10	**26**	**260%**
7.01.03.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga masyarakat yang mendapatpembinaan/pemberdayaan	8	8	8	8	100%	8	**24**	**300%**

7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti**	**77%**	**60%**	**75%**	**75%**	**100%**	**77%**	**2.12**	**275%**
7.01.04.2.01	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	4	4	4	4	100%	4	**12**	**300%**
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Presentase Desa Dengan Laporan Administrasi baik**	**90%**	**78%**	**89,5%**	**90%**	**100%**	**90%**	**256%**	**287%**
5.1.01.01	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi	8	8	8	8	100%	8	**24**	**300%**
7.1.6.01	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti**	**75%**	**-**	**-**	**-**	**-**	**75%**	**75%**	**100%**
7.1.6.01.2.09	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan UmumSesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti pembinaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	50	-	-	-	-	50	**50**	**100%**

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Sukadiri

Perangkat Daerah Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang, merupakan Lembaga Teknis Daerah sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah dalam perencanaan pembangunan. Pencanangan pembangunan yang berkualitas dan professional dapat menjadi wahana untuk memperbaiki pola pembangunan di tingkat daerah, sehingga daerah dapat berkiprah dengan leluasa untuk membangun daerahnya sesuai potensi dan kemampuan yang ada (potensi lokal).

Perangkat Daerah Kecamatan Sukadiri yang berfungsi sebagai Perangkat Daerah Koordinatif dan Pelayanan masyarakat mempunyai tujuan utamanya adalah untuk kepuasan pelayanan masyarakat secara umum, capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Sukadiri dapat dicapai bila Indeks Kepuasan Masyarakat tercapai sesuai dengan target. Untuk mendapatkan kepuasan Masyarakat dengan Indeks Kepuasan Masyarakat yang tinggi perlu adanya Standar Pelayanan Minimal (SPM) karena SPM merupakan tolok ukur bagi aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Gambar 2.1. Pelayanan di kecamatan Sukadiri



Kegiatan pelayanan di Kecamatan Sukadiri tidak hanya memberikan sarana dan prasarana yang baik untuk masyarakat, namun juga memberikan pelayanan prima dan melakukan berbagi pelayanan tambahan seperti antar KTP warga ke rumah, pelayanan IKD ke desa-desa dan sosialisasi, pengarahan dan edukasi secara offline maupun online.

Adapun beberapa hal yang perlu dilakukan untuk keberhasilan pelaksanaan dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, antara lain :

1. Memberikan pelatihan bagi pegawai sesuai dengan bidang tugasnya.
2. Meningkatkan sistem pelayanan di Kecamatan Sukadiri dengan cara berkoordinasi dengan Dinas terkait.
3. Meningkatkan kualitas ruang pelayanan untuk meningkatkan

kenyamanan dan kebersihan ruang pelayanan.

4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

Pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Sukadiri dapat dilihat sebagaimana Tabel 3 berikut :

Tabel 2.2.1

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Sukadiri

Kabupaten Tangerang

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian			Proyeksi	Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat	80	82	89,34	89,35	89,67	78,25	80,5	88	Mengalamkenaikan dibandingkan tahun 2023
2	Nilai AKIP Kecamatan Sukadiri	Nilai AKIP	Hasil Nilai AKIP	78	80	82,2	83,6	58,68	5,5	80,5	82,8	Di Tahun 2024 mengalami kenaikan nilai
3	Presentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Presentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Hasil Presentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	60	75	77	-	60	75	77		Telah sesuai target namun di Tahun 2024 sudah tidak menjadi standar indikator kinerja utama kecamatan

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu penyelenggaraan tugas dan fungsi yang ada di Kecamatan Sukadiri antara lain sebagai berikut:

1. Masih banyaknya tingkat stunting dan keluarga berisiko stunting di wilayah Kecamatan Sukadiri.
2. Masih adanya beberapa wilayah rawan banjir di wilayah Kecamatan Sukadiri.
3. Perlunya peningkatan dan pengembangan UMKM di wilayah Sukadiri guna memberdayakan produk dalam negeri.
4. Masih kurangnya sarana dan prasarana pelayanan publik guna

mendukung pelaksanaan pelayanan publik yang bekualitas.

5. Masih banyaknya pelanggaran Perda tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum.
6. Masih banyaknya infrastruktur dasar baik jalan, jembatan, saluran drainase, sarana pendidikan dan sarana kesehatan yang kurang baik dan mendesak untuk dibangun.
7. Masih minimnya kepedulian masyarakat tentang kebersihan dan persampahan.

Untuk menjawab isu isu di Kecamatan Sukadiri maka dibentuklah beberapa kebijakan perencanaan kegiatan di Kecamatan Sukadiri adalah sebagai berikut :

1. Gerakan Bersama Atasi Kemiskinan Ekstream dan Stunting (Gebrak Tegas) Pencegahan dan penurunan Stunting dan penghapusan kemiskinan ekstream berupa Pemberian Makanan Tambahan (PMT) balita Stunting, rembuk stunting.
2. Penyelenggaraan pemberdayaan keluarga prasejahtera.
3. Verifikasi dan validasi data pengangguran.
4. Kecamatan tanggap bencana dan penanganan pasca bencana.
5. Rehabilitasi RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) dan Rehabilitas yang terdampak bencana.
6. Pengangkutan sampah dari tempat pembuangan sampah sementara sampai tiba di tempat pembuangan sampah di akhir untuk wilayah sekitar jalan desa/kelurahan.

2.4 Review Terhadap Rancangan RKPD Perubahan

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Sukadiri Tahun 2025 merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam arah kebijakan RPJPD Kabupaten Tangerang tahun 2025-2026 yang dijabarkan dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2026. Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Kecamatan Sukadiri Tahun 2025 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017.

Dalam konteks perencanaan pembangunan, Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan

potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan, melayani/memenuhi kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, dalam era globalisasi, Kecamatan Sukadiri dituntut untuk siap dan sanggup membuat/menyusun suatu perencanaan yang baik, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Untuk lebih jelasnya mengenai review rancangan RKPD Perubahan Tahun 2025 dapat dilihat Tabel 3 berikut ini:

Tabel 2.4.1
Review Terhadap Rancangan RKPD Perubahan Tahun 2025
Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang

No	Rancangan RKPD Perubahan					Hasil Analisi Kebutuhan					
	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
	KECAMATAN SUKADIRI				**14.590.275.759,00**					**14.590.275.759,00**	
	UNSUR KEWILAYAHAN				**14.590.275.759,00**	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**14.590.275.759,00**	
	KECAMATAN				**14.590.275.759,00**	**KECAMATAN**				**14.590.275.759,00**	
1,	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Kec. Sukadiri**	**100 Persen**	**9.192.783.749,00**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Kec. Sukadiri**	**100 Persen**	**9.192.783.749,00**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		*Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun dibagi jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	4 Dokumen 7 Jenis	103.862.000,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		*Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun dibagi jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	4 Dokumen 7 Jenis	103.862.000,00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					
		Kab. Tangerang, Sukadiri, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	4 Dokumen	49.595.000,00		Kab. Tangerang, Sukadiri, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	4 Dokumen	49.595.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					

		Kab. Tangerang, Sukadiri, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	1 Laporan	22.273.000,00		Kab. Tangerang, Sukadiri, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	1 Laporan	22.273.000,00	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
		Kab. Tangerang, Sukadiri, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	2 Laporan	31.994.000,00		Kab. Tangerang, Sukadiri, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	2 Laporan	31.994.000,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		*Jumlah laporan keuangan*	2 dokumen	6.145.541.893,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		*Jumlah laporan keuangan*	2 dokumen	6.145.541.893,00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					
		Kab. Tangerang, Sukadiri, Semua Kel/Desa	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	26 Orang/bulan	6.122.519.893,00		Kab. Tangerang, Sukadiri, Semua Kel/Desa	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	26 Orang/bulan	6.122.519.893,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD					
		Kab. Tangerang, Sukadiri, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD*	1 Laporan	23.022.000,00		Kab. Tangerang, Sukadiri, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD*	1 Laporan	23.022.000,00	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		*Prosentase aparatur yang meningkat kapasitasnya*	100 %	127.938.820,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		*Prosentase aparatur yang meningkat kapasitasnya*	100 %	127.938.820,00	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya					Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya					
		Kab. Tangerang, Sukadiri, Semua Kel/Desa	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*	45 Paket	80.607.000,00		Kab. Tangerang, Sukadiri, Semua Kel/Desa	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*	45 Paket	80.607.000,00	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					

		Kab. Tangerang, Sukadiri, Semua Kel/Desa	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*	40 Orang	47.331.820,00		Kab. Tangerang, Sukadiri, Semua Kel/Desa	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*	40 Orang	47.331.820,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		*Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah*	7 Jenis	774.003.900,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah		*Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah*	7 Jenis	774.003.900,00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					
		Kab. Tangerang, Sukadiri, Semua Kel/Desa	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	4 Paket	18.589.000,00		Kab. Tangerang, Sukadiri, Semua Kel/Desa	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	4 Paket	18.589.000,00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					
		Kab. Tangerang, Sukadiri, Semua Kel/Desa	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	15 Paket	543.858.400,00		Kab. Tangerang, Sukadiri, Semua Kel/Desa	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	15 Paket	543.858.400,00	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					
		Kab. Tangerang, Sukadiri, Semua Kel/Desa	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*	14 Paket	18.192.100,00		Kab. Tangerang, Sukadiri, Semua Kel/Desa	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*	14 Paket	18.192.100,00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					Penyediaan Bahan Logistik Kantor					
		Kab. Tangerang, Sukadiri, Semua Kel/Desa	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	40 Paket	24.064.520,00		Kab. Tangerang, Sukadiri, Semua Kel/Desa	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	40 Paket	24.064.520,00	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					
		Kab. Tangerang, Sukadiri, Semua Kel/Desa	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	7 Paket	57.756.880,00		Kab. Tangerang, Sukadiri, Semua Kel/Desa	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	7 Paket	57.756.880,00	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu					Fasilitasi Kunjungan Tamu					

		Kab. Tangerang, Sukadiri, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	24 Laporan	61.020.000,00		Kab. Tangerang, Sukadiri, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	24 Laporan	61.020.000,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					
		Kab. Tangerang, Sukadiri, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	2 Laporan	50.523.000,00		Kab. Tangerang, Sukadiri, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	2 Laporan	50.523.000,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		*Tersedianya Jasa Penunjang*	3 Jenis	1.103.497.168,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		*Tersedianya Jasa Penunjang*	3 Jenis	1.103.497.168,00	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					Penyediaan Jasa Surat Menyurat					
		Kab. Tangerang, Sukadiri, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	12 Laporan	4.464.000,00		Kab. Tangerang, Sukadiri, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	12 Laporan	4.464.000,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					
		Kab. Tangerang, Sukadiri, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	4 Laporan	175.593.600,00		Kab. Tangerang, Sukadiri, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	4 Laporan	175.593.600,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					
		Kab. Tangerang, Sukadiri, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	7 Laporan	923.439.568,00		Kab. Tangerang, Sukadiri, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	7 Laporan	923.439.568,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		*Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan*	5 Jenis	937.939.968,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		*Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan*	5 Jenis	937.939.968,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					
		Kab. Tangerang, Sukadiri, Semua Kel/Desa	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*	6 Unit	72.299.984,00		Kab. Tangerang, Sukadiri, Semua Kel/Desa	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*	6 Unit	72.299.984,00	

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					
		Kab. Tangerang, Sukadiri, Semua Kel/Desa	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	3 Unit	126.339.984,00		Kab. Tangerang, Sukadiri, Semua Kel/Desa	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	3 Unit	126.339.984,00	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					
		Kab. Tangerang, Sukadiri, Semua Kel/Desa	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	30 Unit	39.300.000,00		Kab. Tangerang, Sukadiri, Semua Kel/Desa	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	30 Unit	39.300.000,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					
		Kab. Tangerang, Sukadiri, Semua Kel/Desa	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	4 Unit	500.000.000,00		Kab. Tangerang, Sukadiri, Semua Kel/Desa	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	4 Unit	500.000.000,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					
		Kab. Tangerang, Sukadiri, Semua Kel/Desa	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	1 Unit	200.000.000,00		Kab. Tangerang, Sukadiri, Semua Kel/Desa	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	1 Unit	200.000.000,00	
2,	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		**Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara**	**100 92 Persen Persen**	**3.730.326.030,00**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		**Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara**	**100 92 Persen Persen**	**3.730.326.030,00**	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		*Total terpenuhinya paten sesuai dengan standar/ total seluruh paten di masing- masing kecamatan x 100%*	100 %	34.375.560,00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		*Total terpenuhinya paten sesuai dengan standar/ total seluruh paten di masing- masing kecamatan x 100%*	100 %	34.375.560,00	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					

		Kab. Tangerang, Sukadiri, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	2 Laporan	34.375.560,00		Kab. Tangerang, Sukadiri, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	2 Laporan	34.375.560,00	
	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum		*Jumlah infrastruktur dasar yang dipelihara*	45 titik	3.695.950.470,00	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum		*Jumlah infrastruktur dasar yang dipelihara*	45 titik	3.695.950.470,00	
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum					Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum					
		Kab. Tangerang, Sukadiri, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum*	4 Dokumen	3.695.950.470,00		Kab. Tangerang, Sukadiri, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum*	4 Dokumen	3.695.950.470,00	
3,	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		**Persentase pemenuhan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan Kec. Sukadiri**	**89,5 Persen**	**1.213.003.400,00**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		**Persentase pemenuhan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan Kec. Sukadiri**	**89,5 Persen**	**1.213.003.400,00**	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		*Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan/pemberdayaa n Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	10 Kelompok 9 Laporan	1.093.202.000,00	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		*Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan/pemberdayaa n Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	10 Kelompok 9 Laporan	1.093.202.000,00	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa					Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa					
		Kab. Tangerang, Sukadiri, Semua Kel/Desa	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa*	9 Lembaga Kemasyara katan	68.776.000,00		Kab. Tangerang, Sukadiri, Semua Kel/Desa	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa*	9 Lembaga Kemasyara katan	68.776.000,00	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan					Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan					

		Kab. Tangerang, Sukadiri, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	9 Laporan	1.024.426.000,00		Kab. Tangerang, Sukadiri, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	9 Laporan	1.024.426.000,00	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		*Jumlah Lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan*	8 Desa	119.801.400,00	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		*Jumlah Lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan*	8 Desa	119.801.400,00	
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat					Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat					
		Kab. Tangerang, Sukadiri, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat*	2 Laporan	108.269.400,00		Kab. Tangerang, Sukadiri, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat*	2 Laporan	108.269.400,00	
	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna					Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna					
		Kab. Tangerang, Sukadiri, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna*	1 Laporan	11.532.000,00		Kab. Tangerang, Sukadiri, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna*	1 Laporan	11.532.000,00	
4,	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		**Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti**	**79 Persen**	**111.930.900,00**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		**Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti**	**79 Persen**	**111.930.900,00**	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		*Jumlah kegiatan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan*	1 Dokumen	111.930.900,00	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		*Jumlah kegiatan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan*	1 Dokumen	111.930.900,00	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan					Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan					
		Kab. Tangerang, Sukadiri, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan*	4 Laporan	111.930.900,00		Kab. Tangerang, Sukadiri, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan*	4 Laporan	111.930.900,00	
5,	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		**Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti**	**75 Persen**	**235.482.280,00**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		**Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti**	**75 Persen**	**235.482.280,00**	

	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		*Jumlah Orang yang mengikuti pembinaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah*	50 % 50 Orang	235.482.280,00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		*Jumlah Orang yang mengikuti pembinaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah*	50 % 50 Orang	235.482.280,00	
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia					Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia					
		Kab. Tangerang, Sukadiri, Semua Kel/Desa	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia*	50 Orang	177.154.200,00		Kab. Tangerang, Sukadiri, Semua Kel/Desa	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia*	50 Orang	177.154.200,00	
	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa					Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa					
		Kab. Tangerang, Sukadiri, Semua Kel/Desa	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa*	50 Orang	11.468.080,00		Kab. Tangerang, Sukadiri, Semua Kel/Desa	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa*	50 Orang	11.468.080,00	
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan					Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan					
		Kab. Tangerang, Sukadiri, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan*	2 Dokumen	46.860.000,00		Kab. Tangerang, Sukadiri, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan*	2 Dokumen	46.860.000,00	

6,	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**		**Persentase tertib administrasi pemerintahan desa**	**90 Persen**	**106.749.400,00**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**		**Persentase tertib administrasi pemerintahan desa**	**90 Persen**	**106.749.400,00**	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		*Jumlah desa dengan laporan keuangan dan administrasi baik*	8 Dokumen	106.749.400,00	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		*Jumlah desa dengan laporan keuangan dan administrasi baik*	8 Dokumen	106.749.400,00	
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa					Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa					
		Kab. Tangerang, Sukadiri, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa*	1 Dokumen	106.749.400,00		Kab. Tangerang, Sukadiri, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa*	1 Dokumen	106.749.400,00	
					14.590.275.759,00					**14.590.275.759,00**	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

a. Bahwa Usulan Program / Kegiatan yang dibahas didalam musrenbang mekanismenya diawali dari penggalian gagasan dari tingkat Dusun/ Lingkungan melibatkan unsur Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Unsur Perempuan dan Organisasi Kemasyarakatan sehingga menghasilkan usulan program yang di bawa ke form Musrenbangdes. Pada form Musrenbangdes menghasilkan skala prioritas usulan tingkat Desa/ Kelurahan selanjutnya ditunjuk perwakilan dari Desa / Kelurahan untuk mengawal usulan tersebut di Form Musrenbang Tingkat Kecamatan.

b. Hasil Musrenbang Kecamatan merupakan Skala prioritas program yang telah sesuai dengan kebutuhan *real* masyarakat serta isu - isu penting dari masing-masing Perangkat Daerah yang ada pada Unit Pelaksana Teknis di tingkat Kecamatan. Perangkat Daerah Kecamatan Sukadiri sebagai fasilitator untuk menampung usulan dari Desa yang diumumkan ke Perangkat Daerah terkait.

   Berikut hasil penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat di wilayah Kecamatan Sukadiri untuk Tahun 2025 :

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam rangka mewujudkan konsistensi perencanaan pembangunan dan penganggaran, maka Dokumen Perencanaan disusun mulai dari RPJPD, RPJMD, RKPD dan Renstra Badan Pembangunan Daerah yang harus disinkonisasikan dengan kebijakan nasional melalui , sedangkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah diaktualisasikan melalui Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), dimana terdapat 9 (sembilan) bidang pembangunan sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005–2025, dengan isu-isu strategis pada masing-masing bidang sebagai berikut :

1. Bidang Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama
   a. Pengendalian Jumlah Penduduk;
   b. Reformasi Pembangunan Kesehatan:
      1) Sistem Jaminan Sosial Nasional (demand and supply);
      2) Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi.
   c. Reformasi Pembangunan Pendidikan;
   d. Sinergi Percepatan.
2. Bidang Ekonomi
   a. Transformasi Sektor Industri Dalam Arti Luas;
   b. Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja;
   c. Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi;
   d. Peningkatan Efisiensi Sistem Logistik dan Distribusi;
   e. Reformasi Keuangan Negara.
3. Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
   a. Peningkatan Kapasitas Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
4. Bidang Sarana dan Prasarana
   a. Peningkatan Ketahanan Air;
   b. Penguatan Konektivitas Nasional:
      1) Keseimbangan Pembangunan Antar Wilayah;
      2) Pendorong Pertumbuhan Ekonomi;
      3) Pembangunan Transportasi Massal Perkotaan.
   c. Peningkatan Ketersediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar:
      1) Peningkatan Rasio Elektrifikasi Nasional;
      2) Peningkatan Akses Air Minum dan Sanitasi;
      3) Penataan Perumahan/Permukiman.
5. Bidang Politik
   a. Konsolidasi Demokrasi.
6. Bidang Pertahanan dan Keamanan
   2.6 Percepatan Pembangunan MEF dan Almatsus POLRI
   2.7 Pemberdayaan Industri Pertahanan
   2.8 Peningkatan Ketertiban dan Keamanan Dalam Negeri.
7. Bidang Hukum dan Aparatur
   a. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Publik;
   b. Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.
8. Bidang Wilayah dan Tata Ruang
   a. Pembangunan Daerah Tertinggal dan Perbatasan;
   b. Pengelolaan Risiko Bencana;
   c. Sinergi Pembangunan Perdesaan.

9. Bidang Sumberdaya Alam dan Lingkungan
    a. Perkuatan Ketahanan Pangan;
    b. Peningkatan Ketahanan Energi;
    c. Percepatan Pembangunan Kelautan;
    d. Peningkatan Perekonomian dan Keanekaragaman Hayati dan Kualitaslingkungan hidup

Sedangkan untuk RPJMN sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, dengan agenda pembangunan nasional sebagai penjabaran operasional yaitu :

1. Pembangunan sumber daya manusia (SDM) sebagai prioritas utama;
2. Pemerintah akan terus melanjutkan pembangunan infrastruktur;
3. Segala bentuk kendala regulasi disederhanakan, dan dipangkas;
4. Penyederhaan Birokrasi akan terus dilakukan besar-besaran;
5. Transformasi Ekonomi.

Untuk itu, Pemerintah Kabuaten Tangerang harus mendukung tercapainya bidang-bidang pembangunan nasional tersebut sesuai dengan potensi dan kondisi daerah, mengingat keberhasilan pencapaian bidang bidang pembangunan nasional dimaksud sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah Provinsi dan pemerintah Pusat yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sinkronisasi kebijakan tersebut lebih lanjut dituangkan dalam rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara pemerintah daerah dan DPRD sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD. KUA dan PPAS berpedoman pada RKPD yang telah disinkronisasikan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP)

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan SKPD Tahun 2025 yang akan diimplementasikan ke dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) Kabupaten Tangerang Tahun 2025 Sesuai dengan kerangka pemikiran tersebut di atas, maka Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Sukadiri Tahun 2025 hakekatnya merupakan Dokumen Perencanaan yang memberikan arah perencanaan pembangunan secara menyeluruh dan terpadu. Dalam proses penyusunan Renja juga harus memperhatikan kebijakan- kebijakan yang dilaksanakan baik oleh pemerintah pusat maupun provinsi.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Dalam rangka mewujudkan Misi Kabupaten Tangerang, maka perlu dijabarkan kembali ke dalam tujuan dan sasaran strategis yang lebih operasional yang dituangkan dalam Renja Perubahan Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang Tahun 2025, yaitu:

3.2.1 Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Penetapan Tujuan dalam Rencana Kerja didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama pada Kecamatan Sukadiri.

Adapun rumusan tujuan di dalam Rencana Kerja Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang Tahun 2025 adalah :

3.3 Meningkatkan kualitas pelayanan publik kecamatan

3.2.2 Sasaran

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/ dihasilkan secara nyata oleh Kecamatan Sukadiri dalam jangka waktu Satu tahun mendatang. Sesuai dengan tujuan yang telah diuraikan di atas, maka sasaran capaian target yang akan dituangkan ke dalam rencana kerja Kecamatan Sukadiri Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

2.1 Terpenuhinya pelayanan publik sesuai dengan standar kecamatan

2.2 Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja

Tujuan, sasaran dan indikator kinerja sasaran Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2.2
Tujuan, sasaran dan indikator kinerja sasaran Kecamatan Sukadiri

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Definisi Operasional
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Meningkatkan kualitas pelayanan publik kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat
		Terpenuhinya pelayanan publik sesuai dengan standar kecamatan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat
		Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja	Nilai AKIP	Nilai AKIP

Penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sukadiri adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2.3
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sukadiri

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Target Capaian 2025
1	**Meningkatkan kualitas pelayanan publik kecamatan**		Indeks Kepuasan Masyarakat	89.35

		Meningkatnya pelayanan publik sesuai dengan standar kecamatan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	89,35
		Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja	Nilai AKIP	83.6

3.3 Progam dan Kegiatan

Sebagai perwujudan dalam mendukung prioritas pembangunan Kabupaten Tangerang Tahun 2025, prioritas pembangunan daerah yang terkait dengan kegiatan operasional Kecamatan Sukadiri adalah Peningkatan kualitas perencanaan melalui peningkatan profesionalisme aparatur Kecamatan Sukadiri dalam pembangunan dan peningkatan kualitas dokumen perencanaan yang dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024 dan Tahun 2025 sampai dengan triwulan I yang sudah berjalan, pelaksanaan kinerja Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang Tahun 2025 ditunjang dengan Belanja Tidak Langsung yang anggarannya diperuntukan untuk Belanja Pegawai dan Belanja Langsung yang terdiri dari Belanja Langsung Urusan SKPD dan Belanja Langsung Urusan Wajib dan Pilihan (Program), dengan ruang lingkup kegiatannya.

Rancangan Rencana kerja perubahan untuk tahun 2025, program dan kegiatan yang ada di Perangkat Daerah Kantor Kecamatan Sukadiri pada dasarnya mengacu pada Permendagri No 90 tahun 2019 dan penambahan disesuaikan dengan tuntuntan perkembangan jaman, hal ini disebabkan program yang dilaksanakan telah sesuai dengan rencana kerja yang disusun dalam Dukumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Adapun penjelasan program dan kegiatan untuk Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut :

1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan adalah :
   a. Program dan Kegiatan Rutin setiap tahun
   b. Program dan Kegiatan yang bersifat mendesak untuk dilaksanakan khususnya untuk peningkatan pelayanan masyarakat.
   c. Program dan Kegiatan dibidang pembangunan infrastruktur, perekonomian masyarakat, penanganan kemiskinan ekstream dan stunting, peningkatan SDM dan kualitas tata Kelola pemerintahan.
2. Uraian garis besar rekapitulasi program dan kegiatan untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah dalam Tahun 2025 sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja

dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
c. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD

1.3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
b. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Administrasi Umum Perangkat Daerah
a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
e. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
f. Fasilitasi Kunjungan Tamu
g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

1.4 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

1.5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
e. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainny

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

2.1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
a. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

2.2 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
a. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum

3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

3.1 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
b. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

3.2 Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

a. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
b. Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna

4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

4.1 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

a. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perndang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

5. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

5.1 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

a.Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Des

6. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

6.1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

a. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
b. Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
c. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

3.4 Rencana Perubahan Program dan Kegiatan Kecamatan Sukadiri

Berdasarkan Evaluasi Rencana Kerja sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 Kecamatan Sukadiri terdapat penambahan/pengurangan pagu indikatif sub kegiatan. Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Sukadiri adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4. Pendanaan Program dan Kegiatan Perubahan Tahun 2025

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	APBD 2025	APBD-P 2025					
1	2					3	4	8	9	11	12	13	14	18	19	20
						Kecamatan Sukadiri				14.526.222.431	14.590.275.759				13.555.111.555	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				14.526.222.431	14.590.275.759				13.555.111.555	
	7	01				KECAMATAN				14.526.222.431	14.590.275.759				13.555.111.555	
1	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Kec. Sukadiri	100 Persen	100 Persen	8.966.554.751	9.192.783.749				9.355.111.555	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun dibagi jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	4 Dokumen 7 Jenis	124.013.000	103.862.000				205.000.000	Kecamatan Sukadiri
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	62.965.000	49.595.000	Kab. Tangerang, Sukadiri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		75.000.000	Kecamatan Sukadiri
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD										

							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	22.940.000	22.273.000	Kab. Tangerang, Sukadiri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		65.000.000	Kecamatan Sukadiri
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan	38.108.000	31.994.000	Kab. Tangerang, Sukadiri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		65.000.000	Kecamatan Sukadiri
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan	2 dokumen	2 dokumen	6.053.361.995	6.145.541.893				6.038.765.555	Kecamatan Sukadiri
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang/bulan	26 Orang/bulan	6.022.396.995	6.122.519.893	Kab. Tangerang, Sukadiri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5.988.765.555	Kecamatan Sukadiri
	7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD										
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	1 Laporan	30.965.000	23.022.000	Kab. Tangerang, Sukadiri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		50.000.000	Kecamatan Sukadiri
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase aparatur yang meningkat kapasitasnya	100 %	100 %	171.579.200	127.938.820				175.000.000	Kecamatan Sukadiri
	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya										
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	45 Paket	45 Paket	111.116.000	80.607.000	Kab. Tangerang, Sukadiri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		55.000.000	Kecamatan Sukadiri
	7	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan										

							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	40 Orang	40 Orang	60.463.200	47.331.820	Kab. Tangerang, Sukadiri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		120.000.000	Kecamatan Sukadiri
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	7 Jenis	7 Jenis	645.455.020	645.455.020				935.000.000	Kecamatan Sukadiri
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	18.589.000	18.589.000	Kab. Tangerang, Sukadiri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		30.000.000	Kecamatan Sukadiri
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	15 Paket	343.858.400	543.858.400	Kab. Tangerang, Sukadiri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		500.000.000	Kecamatan Sukadiri
	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga										
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	14 Paket	14 Paket	18.192.100	18.192.100	Kab. Tangerang, Sukadiri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		75.000.000	Kecamatan Sukadiri
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor										
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	40 Paket	40 Paket	17.764.520	24.064.520	Kab. Tangerang, Sukadiri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		50.000.000	Kecamatan Sukadiri
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan										
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	7 Paket	71.760.000	57.756.880	Kab. Tangerang, Sukadiri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		90.000.000	Kecamatan Sukadiri
	7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu										

							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	24 Laporan	24 Laporan	74.160.000	61.020.000	Kab. Tangerang, Sukadiri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100.000.000	Kecamatan Sukadiri
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	2 Laporan	101.131.000	50.523.000	Kab. Tangerang, Sukadiri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		90.000.000	Kecamatan Sukadiri
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang	3 Jenis	3 Jenis	1.034.205.568	1.034.205.568				961.346.000	Kecamatan Sukadiri
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	8.372.400	4.464.000	Kab. Tangerang, Sukadiri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		15.162.000	Kecamatan Sukadiri
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan	175.593.600	175.593.600	Kab. Tangerang, Sukadiri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		185.000.000	Kecamatan Sukadiri
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	7 Laporan	7 Laporan	850.239.568	923.439.568	Kab. Tangerang, Sukadiri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		761.184.000	Kecamatan Sukadiri
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	5 Jenis	5 Jenis	937.939.968	937.939.968				1.040.000.000	Kecamatan Sukadiri

	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	6 Unit	72.299.984	72.299.984	Kab. Tangerang, Sukadiri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		90.000.000	Kecamatan Sukadiri
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	3 Unit	126.339.984	126.339.984	Kab. Tangerang, Sukadiri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		110.000.000	Kecamatan Sukadiri
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	30 Unit	39.300.000	39.300.000	Kab. Tangerang, Sukadiri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		40.000.000	Kecamatan Sukadiri
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	4 Unit	500.000.000	500.000.000	Kab. Tangerang, Sukadiri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		600.000.000	Kecamatan Sukadiri
	7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	200.000.000	200.000.000	Kab. Tangerang, Sukadiri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		200.000.000	Kecamatan Sukadiri
2	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara	100 92 Persen Persen	100 92 Persen Persen	3.627.612.880	3.730.326.030				2.570.000.000	
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak	Total terpenuhinya paten sesuai dengan standar/ total seluruh paten di masing-masing kecamatan x 100%	100 %	100 %	47.362.880	34.375.560				70.000.000	Kecamatan Sukadiri

						Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan										
	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan										
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	2 Laporan	47.362.880	34.375.560	Kab. Tangerang, Sukadiri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		70.000.000	Kecamatan Sukadiri
	7	01	02	2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah infrastruktur dasar yang dipelihara	45 titik 92 %	45 titik	3.580.250.000	3.695.950.470				2.500.000.000	Kecamatan Sukadiri
	7	01	02	2.03	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum										
							Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	4 Dokumen	4 Dokumen	3.580.250.000	3.695.950.470	Kab. Tangerang, Sukadiri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2.500.000.000	Kecamatan Sukadiri
3	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemenuhan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan Kec. Sukadiri	89,5 Persen	89,5 Persen	1.332.426.600	1.213.003.400				1.140.000.000	
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan/pemberdayaan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10 Kelompok	10 Kelompok 9 Laporan	1.199.536.800	1.093.202.000				980.000.000	Kecamatan Sukadiri
	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa										

							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	68.776.000	68.776.000	Kab. Tangerang, Sukadiri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		80.000.000	Kecamatan Sukadiri
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan										
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	9 Laporan	9 Laporan	1.130.760.800	1.024.426.000	Kab. Tangerang, Sukadiri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		900.000.000	Kecamatan Sukadiri
	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	8 Desa	8 Desa	132.889.800	119.801.400				160.000.000	Kecamatan Sukadiri
	7	01	03	2.03	0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat										
							Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2 Laporan	2 Laporan	116.179.800	108.269.400	Kab. Tangerang, Sukadiri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		120.000.000	Kecamatan Sukadiri
	7	01	03	2.03	0005	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna										
							Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	1 Laporan	16.710.000	11.532.000	Kab. Tangerang, Sukadiri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		40.000.000	Kecamatan Sukadiri
4	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	79 Persen	79 Persen	146.808.600	111.930.900				160.000.000	
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen	146.808.600	111.930.900				160.000.000	Kecamatan Sukadiri

	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan									
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	4 Laporan	146.808.600	111.930.900	Kab. Tangerang, Sukadiri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		160.000.000	Kecamatan Sukadiri
5	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	75 Persen	75 Persen	308.560.600	235.482.280				130.000.000	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti pembinaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	50 %	50 % 50 Orang	308.560.600	235.482.280				130.000.000	Kecamatan Sukadiri
	7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia									
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	50 Orang	50 Orang	229.970.600	177.154.200	Kab. Tangerang, Sukadiri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		50.000.000	Kecamatan Sukadiri
	7	01	05	2.01	0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa									
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	50 Orang	50 Orang	16.920.000	11.468.080	Kab. Tangerang, Sukadiri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		30.000.000	Kecamatan Sukadiri
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan									

							Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen	61.670.000	46.860.000	Kab. Tangerang, Sukadiri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		50.000.000	Kecamatan Sukadiri
6	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase tertib administrasi pemerintahan desa	90 Persen	90 Persen	144.259.000	106.749.400				200.000.000	
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa dengan laporan keuangan dan administrasi baik	8 Dokumen	8 Dokumen	144.259.000	106.749.400				200.000.000	Kecamatan Sukadiri
	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa										
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	144.259.000	106.749.400	Kab. Tangerang, Sukadiri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		200.000.000	Kecamatan Sukadiri
	J U M L A H									**14.526.222.431**	**14.590.275.759**				**13.555.111.555**	

Berdasarkan data dari laporan SIPD RI antara RKPD dan renja pada sub kegiatan, program dan total keseluruhan sama namun pada kegiatan ada perbedaan, jika dijumlah dari seluruh sub kegiatan pada satu kegiatan jumlah nya sama, besar kemungkinan karena eror sistem pada tarikan data SIPD RI. Karena tidak ada perbedaan dari jumlah sub kegiatan, program maupun total pagu berikut rinciannya pada tabel 3.5

KODE	KEGIATAN	RKPD PERUBAHAN 2025	RENJA	SELISIH	PENJELASAN
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	103.862.000	124.013.000	20.151.000	Pagu Kegiatan yang muncul pada hasil Tarikan Renja SIPD RI adalah pagu Murni sebelum efesiensi
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.145.541.893	6.053.361.995	92.179.898	Pagu Kegiatan yang muncul pada hasil Tarikan Renja SIPD RI adalah pagu Murni sebelum efesiensi
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	127.938.820	171.579.200	43.640.380	Pagu Kegiatan yang muncul pada hasil Tarikan Renja SIPD RI adalah pagu Murni sebelum efesiensi
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	774.003.900	645.455.020	128.548.880	Pagu Kegiatan yang muncul pada hasil Tarikan Renja SIPD RI adalah pagu Murni sebelum efesiensi
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.103.497.168	1.034.205.568	69.291.600	Pagu Kegiatan yang muncul pada hasil Tarikan Renja SIPD RI adalah pagu Murni sebelum efesiensi
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	937.939.968	937.939.968	-	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja	34.375.560	47.362.880	12.987.320	Pagu Kegiatan yang muncul pada hasil Tarikan Renja SIPD RI adalah pagu

	Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				Murni sebelum efesiensi
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	3.695.950.470	3.580.250.000	115.700.470	Pagu Kegiatan yang muncul pada hasil Tarikan Renja SIPD RI adalah pagu Murni sebelum efesiensi
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1.093.202.000	1.199.536.800	106.334.800	Pagu Kegiatan yang muncul pada hasil Tarikan Renja SIPD RI adalah pagu Murni sebelum efesiensi
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	119.801.400	132.889.800	13.088.400	Pagu Kegiatan yang muncul pada hasil Tarikan Renja SIPD RI adalah pagu Murni sebelum efesiensi
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	111.930.900	146.808.600	34.877.700	Pagu Kegiatan yang muncul pada hasil Tarikan Renja SIPD RI adalah pagu Murni sebelum efesiensi
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	235.482.280	308.560.600	73.078.320	Pagu Kegiatan yang muncul pada hasil Tarikan Renja SIPD RI adalah pagu Murni sebelum efesiensi
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	106.749.400	144.259.000	37.509.600	Pagu Kegiatan yang muncul pada hasil Tarikan Renja SIPD RI adalah pagu Murni sebelum efesiensi

BAB IV
PENUTUP

Dokumen Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang Tahun 2025 ini memuat arah kebijakan tahunan berupa tujuan, sasaran, program, dan kegiatan, disertai dengan target kinerja serta pagu indikatif yang direncanakan untuk dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun ke depan.

Dokumen ini disusun sebagai pedoman utama bagi Kecamatan Sukadiri dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah di tahun 2025. Oleh karena itu, terdapat beberapa hal penting yang perlu menjadi perhatian, sebagaimana dirinci berikut ini:

a. Catatan Penting

1. Perumusan program, kegiatan, dan indikator kinerja dalam Renja Perubahan ini secara prinsip diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tangerang;
2. Penyusunan dokumen ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan Triwulan II Tahun 2025, serta mencerminkan respon terhadap dinamika kebutuhan dan isu strategis yang berkembang di Kecamatan Sukadiri;
3. Terdapat perubahan pada sebagian besar kegiatan dan sub-kegiatan dari dokumen Renja Murni 2025, sebagai bentuk penyesuaian terhadap perkembangan kebutuhan aktual di wilayah Kecamatan;
4. Penyusunan Renja Perubahan ini berpedoman pada RKPD Perubahan Kabupaten Tangerang Tahun 2025, guna menjamin konsistensi antar dokumen perencanaan dan penganggaran daerah.

b. Kaidah Pelaksanaan

Dokumen Renja Perubahan Tahun 2025 ini akan menjadi pedoman pelaksanaan seluruh program dan kegiatan di Kecamatan Sukadiri. Pelaksanaan kegiatan tersebut wajib mengacu pada rencana yang telah ditetapkan dalam dokumen ini agar sinkron, efektif, dan akuntabel sesuai dengan arah kebijakan pemerintah daerah.

c. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen ini, Kecamatan Sukadiri akan melaksanakan:

- Monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program dan kegiatan;
- Pengendalian realisasi anggaran dan capaian kinerja, untuk memastikan kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan di lapangan;
- Pelibatan seluruh aparatur kecamatan, serta partisipasi aktif masyarakat dan pemangku kepentingan (stakeholder) dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan rencana kerja ini.

Penutup

Dengan tersusunnya dokumen Renja Perubahan Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang Tahun 2025 ini, diharapkan dapat menjadi pedoman operasional yang efektif dan aplikatif dalam menjalankan program serta kegiatan pembangunan daerah.

Semoga dokumen ini memberikan manfaat nyata bagi seluruh pihak yang berkepentingan dan dapat mendorong tercapainya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tangerang, serta mewujudkan keselarasan antara proses perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Sukadiri.

53. Kecamatan Cisauk

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan Rencana Kerja Perubahan tahun anggaran 2025 telah dilaksanakan selama satu semester sehingga dapat mengetahui beberapa kekurangan sehingga harus dilaksanakan perbaikan atau penyempurnaan. Oleh karena itu maka dilakukan pengurangan atau penambahan anggaran sebagai akibat dari realisasi kegiatan yang sudah tercapai atau yang belum tercapai dan perubahan target kinerja. Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Cisauk memiliki fungsi yang sangat penting dalam sistem perencanaan SKPD, karena Rencana Kerja Perubahan merupakan produk penyempurnaan perencanaan untuk memaksimalkan kegiatan yang telah di rancang pada Rencana Kerja murni / sebelumnya.

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Cisauk dimulai dari usulan setiap seksi dan juga dari sekretariat yang ada di Wilayah Kecamatan Cisauk (PPTK), kemudian menganalisis gambaran pelayanan Kecamatan Lampihong untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi Rencana Kerja Murni SKPD yakni dari bulan Januari sampai dengan Juni tahun berjalan.

Dalam mewujudkan visi dan misi serta mencapai tujuan, maka Kecamatan Cisauk menetapkan sasaran kinerja yang merupakan acuan atau pedoman yang digunakan untuk mencapai tujuan. Sedangkan indikator kinerja merupakan suatu parameter yang digunakan untuk mengukur tingkat ketercapaian suatu sasaran yang ingin dicapai. Pencapaian indikator Kecamatan Cisauk sampai dengan Bulan Juni Tahun 2025 ditunjukkan oleh tabel 2.1 berikut ini.

Pengukuran Indikator Kinerja sampai dengan bulan Juni Tahun 2025 Kecamatan Cisauk

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat	85,5	10,57%	0.12%
Mewujudkan Birokrasi yang Responsif, Akuntabel dan Inovatif	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik	89.8	3.98%	4,42%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Kecamatan Cisauk sampai dengan Semester I Tahun 2025 dapat disimpulkan bahwa sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dengan Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dikategorikan dengan kriteria ....., dengan capaian sebesar .....% dengan formula perhitungan sebagai berikut

Formula Perhitungan

$$\frac{\text{Total Nilai IKM yang dicapai x 100}}{\text{Target IKM}}$$

Adapun Program dan kegiatan prioritas yang mendukung IKU adalah Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat sub kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 22.437.418.277,00 dan realisasi sampai dengan April 2025 sebesar Rp 4.284.865.506,00 ataui sekitar 14,55%

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang_undang Nomor 4 Tahun 1968 Tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O17 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 14);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru;
20. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentangRencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten

Nomor 26);
21. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten 2010-2030;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Tangerang (Lembaran Tahun 2025 Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2008 Nomor 01, Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0108);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2009 Nomor 02, Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0209);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 09 Tahun 2009 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2009 Nomor 12);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2016 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2016 Nomor 1611);
27. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah;
28. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 33 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2023 Nomor 33).

1.3. Maksud dan Tujuan

✓ Maksud

a. Mewujudkan sinergitas dan singkronisasi pelaksanaan kegiatan Kecamatan Cisauk dengan pengalokasian anggaran secara efektifitas dan efisiens sehingga mewujudkan Tujuan dan Sasaran Kecamatan Cisauk dalam mewujudkan visi dan misi kepala daerah

b. Memberikan arahan dan pedoman bagi seluruh aparatur di Kecamatan Cisauk dalam melaksanakan tugasnya sehingga sasaran dan target program dan kegiatan ditetapkan pada tahun anggaran 2025 dapat berjalan sesuai dengan kebijakan dan petunjuk teknis yang ditetapkan;

c. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholder) tentang Rencana Kerja Kecamatan Cisauk;
d. Mempermudah pengendalian, monitoring, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan rencana kegiatan pada tahun 2025;

e. Memberikan pedoman dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada masing-masing bagian di lingkungan Kecamatan Cisauk.

- ✓ Tujuan
  Tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan Renja Perubahan Kecamatan Cisauk tahun 2025 ini adalah sebagai penyempurnaan Rencana Kerja tahun 2025. Perubahan Renja disusun untuk menyesuaikan perubahan program dan kegiatan yang kinerja SKPD yang telah ditetapkan karena perubahan kondisi dan permasalahan yang dihadapi.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Cisauk Kabupaten Tangerang Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan
- 1.1 Latar belakang;
- 1.2 Landasan Hukum;
- 1.3 Maksud dan tujuan;
- 1.4 Sistematika penulisan

Bab II Hasil Evaluasi Rencana Kerja Murni
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Murni
- 2.2. Sumber Daya Kecamatan Cisauk
- 2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Cisauk

Bab III Rencana Kerja Perubahan Dan Pendanaan
- 3.1. Kegiatan Lanjutan Tahun Berjalan
- 3.2. Pergeseran Kegiatan

Bab IV Penutup

BAB II
EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI TRIWULAN SATU KECAMATAN CISAUK KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Program dan Kegiatan kegiatan

Guna mewujudkan Tujuan dan Sasaran Kecamatan Cisauk pada tahun 2025 direncanakan melaksanakan 6 (enam) program 14 (Empat belas) kegiatan dengan 35 (Tiga Puluh Lima) sub kegiatan pada tahun 2025 sebagaimana disampaikan pada table 2.1.

Tabel 2.1
Realisasi Program/Kegiatan sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

No	Urusan Bidang Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 2025 (Rp)	Realisasi Keuangan		Sisa Anggaran
				Rp	%	
I	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase pemenuhan administrasi keuangan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**6.743.860.852,00**	**1.750.140.488,00**	**25,95**	**4.993.720.364,00**
I.1	**Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tersedianya Dokumen Perencanaan, enganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**88.083.400,00**	0,00	0,00	**88.083.400,00**
I.1.2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen RAB, Renja, Renstra dan RKA/DPA dan RKAP/RDPA	35.310.000,00	0,00	0,00	35.310.000,00
I.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	10.565.000,00	0,00	0,00	10.565.000,00
I.1.4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Basis data/selayang pandang/Profil SKPD	42.208.400,00	0,00	0,00	42.208.400,00
1.2	Administrasi Keuangan	Tersedianya Laporan Keuangan	6.655.777.452,00	1.750.140.488,00	26,30	4.905.636.964,00
I.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	6.648.187.452,00	1.750.140.488,00	26,30	4.905.636.964,00
I.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya dokumen laporan keuangan	7.590.000,00	0,00	0,00	7.590.000,00
I.3	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Barang Milik Daerah	13.818.350,00	0,00	0,00	13.818.350,00
I.3.1	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersedianya dokumen aset/barang daerah	13.818.350,00	0,00	0,00	13.818.350,00

I.4	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Jumlah pegawai yang difasilitasi	168.601.830,00	0,00	0,00	168.601.830,00
I.4.1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pegawai yang difasilitasi	53.479.800,00	0,00	0,00	53.479.800,00
I.4.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang difasilitasi	115.122.030,00	0,00	0,00	115.122.030,00
I.5	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	716.025.568,00	144.844.050,00	20,23	571.181.518,00
I.5.1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya alat Alat Kebersihan dan peralatan gedung kantor	403.755.291,00	106.543.500,00	26,39	297.211.791,00
I.5.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Alat Tulis kantor	73.750.577,00	8.775.000,00	11,90	64.975.577,00
I.5.3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang cetakan, mesin penggandaan dokumen	52.574.700,00	3.724.550,00	7,08	48.850.150,00
I.5.6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya makanan dan minuman rapat dan makan minum tamu	152.595.000,00	25.801.000,00	16,91	126.794.000,00
I.5.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Laporan Hasil rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	33.350.000,00	0,00	0,00	33.350.000,00
I.6	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Tersedianya Jasa penunjang uruasan pemerintahan daerah	1.879.387.540,00	436.532.698,00	23,23	1.442.854.842,00
I.6.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	332.071.472,00	62.815.698,00	18,92	269.255.774,00
I.6.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya iklan/media cetak, jasa kebersihan kantor, jasa pengamanan kantor	1.547.316.068,00	373.717.000,00	24,15	1.173.599.068,00
I.7	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		1.628.900.750,00	48.671.000,00	2,99	1.580.229.750,00

I.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	160.380.000,00	14.803.000,00	9,23	111.709.000,00
I.7.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional kebersihan	184.074.000,00	13.368.000,00	7,26	170.706.000,00
I.7.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Pemeliharaan rutin peralatan mesin lainnya	175.250.000,00	20.500.000,00	11,70	154.750.000,00
I.7.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya pemeliharaan rutin gedung kantor	1.077.756.750,00	0,00	0,00	1.077.756.750,00
I.7.5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya sarana dan prasarana gedung kantor kelurahan	31.440.000,00	0,00	0,00	31.440.000,00
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar	232.079.500,00	0,00	0,00	232.079.500,00
		Prosentase Jumlah infrastruktur dasar dalam kondisi baik di Kecamatan Cisauk	7.274.478.017,00	1.213.522.108,00	20,29	7.274.478.017,00
II.1	PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN	tersedianya pemenuhan sarana dan prasarana PATEN di kecamatan	35.141.500,00	0,00	0,00	35.141.500,00
II.1.2	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	"Terlaksananya pembinaan administrasi kependudukan dan casip dan jasa petugas pelayanan PATEN	35.141.500,00	0,00	0,00	35.141.500,00

II.2	KOORDINASI PEMELIHARAAN PRASARANA DAN SARANA PELAYANAN UMUM	Jumlah infrastruktur dasar yang dipelihara	7.274.478.017,00	1.213.522.108,00	16,68	6.060.955.909,00
II.2.1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	7.274.478.017,00	1.213.522.108,00	16,68	6.060.955.909,00
II.3	PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT	Tersedianya Pemeliharaan sarana dan prasarana Pelayanan Umum	196.938.000,00	0,00	0,00	196.938.000,00
II.3.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah infrastruktur dasar yang dipelihara	196.938.000,00	0,00	0,00	196.938.000,00
III	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase masyarakat yang di fasilitasi dalam pemberdayaan masyarakat di kec cisauk	2.989.852.370,00	503.224.962,00	16,83	2.486.627.408,00
III.1	KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA	Jumlah Kelompok Masyarakat yang mendapatkan pembinaan/pemberdayaan	1.623.742.600,00	145.909.000,00	8,99	1.477.833.600,00
III.1.1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Cabang olehraga yang di bina dan di kembangkan	1.623.742.600,00	145.909.000,00	8,99	1.477.833.600,00
III.2	KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN	Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan/pemberdayaan	1.138.417.770,00	341.183.962,00	29,97	797.233.808,00
III.2.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Terlaksananya Musrenbang Kelurahan	8.618.000,00	7.718.000,00	89,56	900.000,00
III.2.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terlaksananya Pemeliharaan jalan lingkungan kelurahan	513.467.100,00	238.330.962,00	46,42	275.136.138,00
III.2.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya kegiatan penguatan kelembagaan dan peningkatan SDM dan pemberdayaan Organisasi di kelurahan'	616.332.670,00	95.135.000,00	15,44	521.197.670,00

IV.1	PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA TINGKAT KECAMATAN DAN KELURAHAN	Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan/pemberdayaan	227.692.000,00	16.132.000,00	7,09	211.560.000,00
IV.1.1	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Terpenuhinya Fasilitasi dan kegiatan pembinaan kader PKK	227.692.000,00	16.132.000,00	7,09	211.560.000,00
V	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	284.730.700,00	35.054.000,00	12,31	249.676.700,00
V.1	KOORDINASI PENERAPAN DAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH	Jumlah Kegiatan Ketertiban dan Ketentraman Umum di Kecamatan	284.730.700,00	35.054.000,00	12,31	249.676.700,00
V.1.1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Terlaksananya Pembinaan Ketentraman dan ketertiban umum	284.730.700,00	35.054.000,00	12,31	249.676.700,00
VI	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Prosentase Program Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum	268.905.600,00	0,00	0,00	268.905.600,00
VI.1	PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH	Jumlah Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahunrnn1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	268.905.600,00	0,00	0,00	268.905.600,00

VI.1.1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahunrnn1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahunrnn1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	268.905.600,00	0,00	0,00	268.905.600,00
VII	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Prosentase desa dengan laporan keuangan baik	236.777.200,00	152.876.200,00	64,57	83.901.000,00
VII.1	FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah desa yang difasilitasi	236.777.200,00	152.876.200,00	64,57	236.777.200,00
VII.1.2	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa danrnnPeraturan Kepala Desa	"Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan	6.428.000,00	0,00	0,00	6.428.000,00
VII.1.3	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kepala Desa"	43.851.000,00	0,00	0,00	43.851.000,00
VII.1.4	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah dokumen Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa yang dilaporkan sesuai ketentuan	28.254.000,00	6.867.000,00	24,30	21.387.000,00
VII.1.5	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	jumlah aparatur pemerintah desa yang dibina dalam bidang Pengelolaan admisnitrasi desa	13.465.000,00	3.030.000,00	22,50	10.435.000,00
VII.1.6	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	144.779.200,00	142.979.200,00	98,76	1.800.000,00
JUMLAH BELANJA DAERAH DAN REALISASI			22.437.418.277,00	4.284.865.506,00	19,10	18.152.552.771,00

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja-P Kecamatan Cisauk tahun 2025 sampai dengan triwulan I dapat disampaikan bahwa hasil capaian kinerja dari 6 (enam) program 14 (Empat belas) kegiatan dengan 35 (Tiga Puluh Lima) sub kegiatan pada tahun 2025, adalah sebesar Rp. 4.284.865.506,00 atau 19,10% dari total anggaran sebesar Rp. 22.437.418.277,00.

Guna melaksanakan seluruh program dan kegiatan serta untuk mencapai sasaran yang diinginkan di Kecamatan Cisauk Kabupaten Tangerang tahun 2025 sebesar Rp. 22.437.418.277,00, terdapat Perubahan Anggaran pada periode Triwulan I s.d Triwulan IV, yaitu :

1. Terdapat Penyesuaian Hasil RAPBD sebesar Rp. 23.060.107.845 dari Anggaran APDB Murni sebesar Rp 17.097.241.856, Penyesuaian Hasil RAPBD dapat dilihat dari Tabel 2.2

Tabel 2.2
Rincian Anggaran Belanja Program dan Kegiatan Penyesuaian Hasil RAPBD Tahun 2025

No.	Uraian	Sumber Dana	Tahun N		Bertambah/berkurang
			Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	
	KECAMATAN CISAUK				
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		10.339.388.071,00	10.239.753.766,00	-99.634.305,00
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		102.812.300,00	102.812.300,00	0,00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	PAD	44.930.000,00	44.930.000,00	0,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	PAD	12.545.000,00	12.545.000,00	0,00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PAD	45.337.300,00	45.337.300,00	0,00
	Administrasi Keuangan Perangkat		6.813.229.325,00	6.657.757.452,00	-155.471.873,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	PAD	6.803.659.325,00	6.648.187.452,00	-155.471.873,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	PAD	9.570.000,00	9.570.000,00	0,00
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		18.437.800,00	18.437.800,00	0,00
	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	PAD	18.437.800,00	18.437.800,00	0,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		207.874.130,00	207.874.130,00	0,00
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	PAD	53.479.800,00	53.479.800,00	0,00
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	PAD	154.394.330,00	154.394.330,00	0,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		542.857.776,00	542.857.776,00	0,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PAD	212.886.691,00	212.886.691,00	0,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	PAD	50.630.985,00	50.630.985,00	0,00
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	PAD	53.660.100,00	53.660.100,00	0,00
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	PAD	158.730.000,00	158.730.000,00	0,00

	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PAD	66.950.000,00	66.950.000,00	0,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.250.413.240,00	1.254.306.808,00	3.893.568,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PAD	255.501.240,00	255.501.240,00	0,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PAD	994.912.000,00	998.805.568,00	3.893.568,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.403.763.500,00	1.455.707.500,00	51.944.000,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	PAD	126.491.000,00	126.491.000,00	0,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PAD	132.130.000,00	184.074.000,00	51.944.000,00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PAD	127.400.000,00	127.400.000,00	0,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	PAD	1.017.742.500,00	1.017.742.500,00	0,00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		1.877.032.425,00	7.520.579.517,00	5.643.547.092,00
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		49.017.500,00	49.017.500,00	0,00
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	PAD	49.017.500,00	49.017.500,00	0,00
	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum		1.630.930.925,00	7.274.478.017,00	5.643.547.092,00
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	PAD	1.630.930.925,00	7.274.478.017,00	5.643.547.092,00
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		197.084.000,00	197.084.000,00	0,00
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	PAD	197.084.000,00	197.084.000,00	0,00
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		1.717.752.460,00	2.117.685.460,00	399.933.000,00
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		1.396.706.460,00	1.796.639.460,00	399.933.000,00
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	PAD	1.396.706.460,00	1.796.639.460,00	399.933.000,00
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		321.046.000,00	321.046.000,00	0,00

	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	PAD	321.046.000,00	321.046.000,00	0,00
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		183.677.750,00	183.677.750,00	0,00

	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		183.677.750,00	183.677.750,00	0,00
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	PAD	183.677.750,00	183.677.750,00	0,00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		314.899.800,00	314.899.800,00	0,00
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		314.899.800,00	314.899.800,00	0,00
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	PAD	314.899.800,00	314.899.800,00	0,00
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		264.759.200,00	264.759.200,00	0,00
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		264.759.200,00	264.759.200,00	0,00
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	PAD	9.290.000,00	9.290.000,00	0,00
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	PAD	56.255.000,00	56.255.000	0,00
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	PAD	35.920.000,00	35.920.000,00	0,00
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	PAD	18.515.000,00	18.515.000,00	0,00
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	PAD	144.779.200,00	144.779.200,00	0,00
	KELURAHAN CISAUK		1.502.583.150,00	2.309.436.352,00	806.853.202,00
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		1.054.764.550,00	1.212.380.100,00	157.615.550,00
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		1.054.764.550,00	1.212.380.100,00	157.615.550,00
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	PAD	11.049.000,00	11.049.000,00	0,00
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	PAD	405.266.400,00	513.467.100,00	108.200.700,00
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	PAD	638.449.150,00	687.864.000,00	49.414.850,00
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		109.316.000,00	56.488.650,00	56.488.650,00
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		109.316.000,00	165.804.650,00	56.488.650,00
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	PAD	109.316.000,00	165.804.650,00	56.488.650,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		1.235.651.600,00	1.040.567.602,00	-195.083.998,00

	Administrasi Umum Perangkat Daerah		167.415.100,00	242.293.700,00	74.878.600,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PAD	115.990.000,00	190.868.600,00	74.878.600,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	PAD	23.585.100,00	23.585.100,00	0,00
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	PAD	13.440.000,00	13.440.000,00	0,00
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	PAD	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		614.526.600,00	625.080.652,00	10.554.052,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PAD	71.496.600,00	76.570.152,00	5.073.552,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PAD	543.030.000,00	548.510.500,00	5.480.500,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		453.709.900,00	173.193.250,00	-280.516.650,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	PAD	16.897.400,00	33.889.000,00	16.991.600,00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PAD	51.800.000,00	47.850.000,00	-3.950.000,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	PAD	322.132.500,00	60.014.250,00	-262.118.250,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	PAD	62.880.000,00	31.440.000,00	-31.440.000,00
	JUMLAH		**17.097.241.856,00**	**23.060.107.845,00**	**5.962.865.989,00**

Dilihat dari Tabel 2.2 terdapat penyesuaian hasil RAPBD Tahun 2025 sebesar Rp. 5.962.865.989,00 dengan rincian berikut :

a. Tambahan Anggaran Murni Sebesar Rp. 348.865.989,00
   1) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 2 orang sebesar Rp. 3.893.568,00.
   2) Bensin 10 bulan untuk mobil siaga pada Kelurahan Cisauk sebesar Rp. 19.454.160,00.
   3) BPJS Naker JKK dan JKM pada kelurahan Cisauk sebesar Rp. 6.966.000,00.
   4) Hasil Rekonsilasi belanja pegawai sebesar Rp. 131.380.739,00.
   5) Pasar murah 4 kali dan digilir tempatnya sesuai momen sebesar Rp. 399.933.000,00.
   6) Pemeliharaan truck sampah di kecamatan sebesar Rp. 50.000.000,00.

b. Tambahan Anggaran Pokok-pokok Pikiran sebesar Rp. 5.614.000.000,-
   1) Pembangunan Turap Kp.Cicayur Rt.001/001 Kel.Cisauk Kec.Cisauk sebesar Rp, 200.000.000
   2) Paving Block Kp Setu Rt.14/005 Desa Dangdang Kec.Cisauk sebesar Rp, 100.000,00
   3) Saluran Air U-Ditch Kp Kandang Rt.004/003 Desa Mekarwangi Kec.Cisauk sebesar Rp, 125.000.000
   4) Pengaspalan Jalan Kp Cisauk Sinyal Rt.003/003 Kel Cisauk Kec.Cisauk sebesar Rp, 125.000.000
   5) Pemeliharaan Jalan Paving Block Kp Gawir Rt.006/006 Kel Cisauk Kec.Cisauk sebesar Rp, 100.000.000

6) Saluran Air U-Ditch Kp Sampora Rt.004/004 Desa Sampora Kec.Cisauk sebesar Rp, 125.000.000
7) Pemeliharaan Jalan Hotmix Kp.Panyirapan Rw 04 Ds.Mekarwangi Kec. Cisauk (3X150M) sebesar Rp. 180.000.000
8) Pemeliharaan Tpt/Turap Penanggul Tanah Kp.Gawir Rw 06, Kel.Cisauk Kec. Cisauk (1.5X150 M) sebesar Rp. 150.000.000
9) Pemeliharaan Jalan Hotmix Kp.Cikuda Rt 05 Rw 01 Kel.Cisauk Kec. Cisauk (2X200M) sebesar Rp. 100.000.000
10) Perbaikan Drainase Air Rw 03 Desa. Suradita Kec. Cisauk sebesar Rp. 130.000.000 11)Peningkatan Jalan (Paving Blok) Rw 04 Kel. Cisauk Kec. Cisauk sebesar Rp.
100.000.000
12) Peningkatan Jalan (Paving Blok) Rw 06 Kel. Cisauk Kec. Cisauk sebesar Rp.
100.000.000
13) Perbaikan Saluran Air (Drainase) Rw 05 Kel. Cisauk Kec. Cisauk sebesar Rp.
130.000.000
14) Pembuatan Turap Di Kp. Malahpar Rw.04 Desa Dangdang, Kecamatan Cisauk sebesar Rp. 120.000.000
15) Pemeliharaan Udith Rt 006/001 Ds. Cibogo Kec. Cisauk sebesar Rp. 100.000.000 16)Pemeliharaan Paving Blok Rw. 002 Ds. Cibogo Kec. Cisauk sebesar Rp. 100.000.000 17)Pemeliharaan Hotmix Rt. 004/006 Kel. Cisauk Kec. Cisauk sebesar Rp. 100.000.000
18)Pemeliharaan Hotmix Rt. 008/003 Ds. Dangdang Kec. Cisauk sebesar Rp.
100.000.000
19) Pemeliharaan Paving Blok Rt. 010/004 Ds. Dangdang Kec. Cisauk sebesar Rp.
100.000.000
20) Pemeliharaan Hotmix Rw. 002 Ds. Suradita Kec. Cisauk sebesar Rp.
100.000.000
21) Hotmix Kp. Kadumangu Kel. Cisauk Kec. Cisauk sebesar Rp. 25.000.000
22) Bedah Rumah Kp. Sampora Rt. 01/02 Desa Sampora Kec. Cisauk sebesar Rp.
30.000.000
23) Pemeliharaan Jalan Rw. 004 Desa. Suradita Kec. Cisauk sebesar Rp. 100.000.000 24)Penataan Lingkungan Rw. 05 Desa. Suradita Kec. Cisauk sebesar Rp. 100.000.000 25)Penataan Lingkungan Rt. 010/04 Desa. Suradita Kec. Cisauk sebesar Rp. 100.000.000
26) Hotmix Kp. Kadumangu Kel. Cisauk Kec. Cisauk sebesar Rp. (30.000.000)
27) Bedah Rumah Kp. Sampora Rt. 01/02 Desa Sampora Kec. Cisauk sebesar Rp. (25.000.000)
28) Pemeliharaan Jalan Hotmix Kp. Kadumangu RT.03/01 kel. Cisauk Kec. Cisauk sebesar Rp. 30.000.000
Pemeliharaan Uditch Area MI Nurul Falah Cisauk Girang RT. 02/05 Kel. Cisauk Kec. Cisauk sebesar Rp. 54.000.000
29) Penerangan Jalan Umum RT. 05/05 Kp. Cisauk Girang Kel. Cisauk Kec. Cisauk sebesar Rp. 20.000.000
30) Peningkatan jl. Lingkungan Rt.01/01 Kel. Cisauk Kec. Cisauk sebesar Rp.100.000.000
31) Peningkatan Jl. Kp. Kebon Pisang Rw.02 kel. Cisauk Kec.

Cisauk sebesar Rp.100.000.000
32) Lanjutan Saluran Air udit bermis Rt. 03/04 Kel. Cisauk Kec. Cisauk sebesar Rp. 100.000.000
33) Saluran air kp. Cisauk girang rt. 04/05 kel. Cisauk Kec. Cisauk sebesar Rp. 100.000.000
34) Udit Saluran air metro serpong 2 blok A rt. 07/06 sebesar Rp. 100.000.000
35) Bedah rumah Kp. Cisauk Girang (Alm. Bp. Anta) Rw.05 Kel. Cisauk sebesar Rp. 30.00.000
36) Peningkatan Jl. Lingkungan Kp. Setu Rw.03 (Bp. Epot) Ds. Dangdang Kec. Cisauk sebesar Rp. 100.000.000
37) Pemeliharaan Jl. Kp. Panyirapan Rw. 04 (Jeri) Ds. Mekar Wangi Kec. Cisauk sebesar Rp. 100.000.000
38) Pemeliharaan Jl. Kp. Kandang (Ustad Tomi) Ds. Mekar Wangi Kec. Cisauk sebesar Rp. 100.000.000
39) Pemeliharan jl. Lingkungan Rt.05/02 (Herdi) Ds. Cibogo kec. Cisauk sebesar Rp. 80.000.000
40) Pemeliharaan sekretariat RW 07 (Warseno) Ds. Suradita Kec. Cisauk sebesar Rp. 80.000.000
41) Pemeliharaan saluran air RT 01/07 (Rochmad) Ds. Suradita Kec. Cisauk sebesar Rp. 80.000.000
42) Pemeliharaan jalan lingkungan Hotmix RT 05/07 (A. Kholil) Ds. Suradita Kec. Cisauk sebesar Rp. 100.000.000
43) Pemeliharaan jl. Lingkungan RT 02/06 (Bp. Suparna) Ds. Suradita Kec. Cisauk sebesar Rp. 100.000.000
44) Pemeliharan Turap RT 04/08 ds. Suradita Kec. Cisauk sebesar Rp. 80.000.000
45) Pemeliharaan saluran air udith RT 10/08 ds. Suradita Kec. Cisauk sebesar Rp. 100.000.000
46) Pemeliharaan jalan lingkungan Hotmix RT 09/08 ds. Suradita Kec. Cisauk sebesar Rp. 100.000.000
47) Pemeliharaan saluran air udit RT 08/08 ds. SuraditaKec. Cisauk sebesar Rp. 80.000.000
48) Lanjutan sarana Olah raga Rt.03/05 (Bp. Cipto) Ds. Suradita Kec. Cisauk sebesar Rp. 80.000.000
49) Udit Saluran air Rt.09/05 (Bp. Budi) Ds. Suradita Kec. Cisauk sebesar Rp. 100.000.000
50) Udit Saluran air Rt.11/05 (Bp. Ramtono) Ds, Suradita Kec. Cisauk sebesar Rp. 100.000.000
51) Lanjutan Saluran air Kp. Cibadak (Bp. Yudi) Rt.02/02 Ds. Suradita Kec. Cisauk sebesar Rp. 85.000.000
52) Bantuan Sarana dan Prasarana Sanggar Seni Cisauk Kec. Cisauk sebesar Rp. 50.000.000
53) Saluran air Udit Rt.11/05 (Rt. Aboy) Ds. Cibogo Kec. Cisauk sebesar Rp. 100.000.000
54) Pemeliharaan jl. Lingkungan Rt.15/05 (Bp. Uyu) Ds. Cibogo Kec, Cisauk sebesar Rp. 100.000.000
55) Peningkatan Jalan lingkungan Rt.02/01 (Mas Edi) Ds. Cibogo Kec. Cisauk sebesar Rp. 80.000.000
56) Udit Saluran air Rt. 22/03 (Bp. Kasyanto) Ds. Cibogo Kec. Cisauk sebesar Rp. 100.000.000
57) Udit Saluran air Rt. 03/06 Ds. Cibogo Kec. Cisauk sebesar Rp. 100.000.000
58) Peningkatan jalan jl. Lingkungan Rt.01/06 (Rt. Kuat) Ds. Cibogo

Kec. Cisauk sebesar Rp. 200.000.000

2. Adanya Recorfusing/ Efesiensi sebesar Rp. 22.437.418.277 dari anggaran penyesuaian hasil RAPBD sebesar 23.060.107.845

Tabel 2.3
Rincian Anggaran Belanja Program dan Kegiatan Recofusing/Efesiensi Tahun 2025

No.	Uraian	Sumber Dana	Tahun N		Bertambah/berkurang
			Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	
	KECAMATAN CISAUK		20.641.355.493,00	20.115.760.875,00	-525.594.618,00
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		10.239.753.766,00	10.112.146.208,00	-127.607.558,00
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		102.812.300,00	88.083.400,00	-14.728.900,00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	PAD	44.930.000,00	35.310.000,00	-9.620.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	PAD	12.545.000,00	10.565.000,00	-1.980.000,00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PAD	45.337.300,00	42.208.400,00	-3.128.900,00
	Administrasi Keuangan Perangkat		6.657.757.452,00	6.655.777.452,00	-1.980.000,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	PAD	6.648.187.452,00	6.648.187.452,00	0,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	PAD	9.570.000,00	7.590.000,00	-1.980.000,00
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		18.437.800,00	13.818.350,00	-4.619.450,00
	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	PAD	18.437.800,00	13.818.350,00	-4.619.450,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		207.874.130,00	168.601.830,00	-39.272.300,00
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	PAD	53.479.800,00	53.479.800,00	0,00
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	PAD	154.394.330,00	115.122.030,00	-39.272.300,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		542.857.776,00	475.850.868,00	-67.006.908,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PAD	212.886.691,00	212.886.691,00	0,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	PAD	50.630.985,00	50.583.477,00	-47.508,00
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	PAD	53.660.100,00	40.835.700,00	-12.824.400,00
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	PAD	158.730.000,00	138.195.000,00	-20.535.000,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PAD	66.950.000,00	33.350.000,00	-33.600.000,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.254.306.808,00	1.254.306.808,00	0,00

	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PAD	255.501.240,00	255.501.240,00	0,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PAD	998.805.568,00	998.805.568,00	0,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.455.707.500,00	1.455.707.500,00	0,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	PAD	126.491.000,00	126.491.000,00	0,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PAD	184.074.000,00	184.074.000,00	0,00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PAD	127.400.000,00	127.400.000,00	0,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	PAD	1.017.742.500,00	1.017.742.500,00	0,00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		7.520.579.517,00	7.506.557.517,00	-14.022.000,00
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		49.017.500,00	35.141.500,00	-13.876.000,00
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	PAD	49.017.500,00	35.141.500,00	-13.876.000,00
	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum		7.274.478.017,00	7.274.478.017,00	0,00
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	PAD	7.274.478.017,00	7.274.478.017,00	0,00
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		197.084.000,00	196.938.000,00	-146.000,00
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	PAD	197.084.000,00	196.938.000,00	-146.000,00
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		2.117.685.460,00	1.851.434.600,00	-266.250.860,00
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		1.796.639.460,00	1.623.742.600,00	-172.896.860,00
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	PAD	1.796.639.460,00	1.623.742.600,00	-172.896.860,00

	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		321.046.000,00	227.692.000,00	-93.354.000,00
	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	PAD	321.046.000,00	227.692.000,00	-93.354.000,00
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		183.677.750,00	139.939.750,00	-43.738.000,00
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		183.677.750,00	139.939.750,00	-43.738.000,00

	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	PAD	183.677.750,00	139.939.750,00	-43.738.000,00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		314.899.800,00	268.905.600,00	-45.994.200,00
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		314.899.800,00	268.905.600,00	-45.994.200,00
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	PAD	314.899.800,00	268.905.600,00	-45.994.200,00
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		264.759.200,00	236.777.200,00	-27.982.000,00
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		264.759.200,00	236.777.200,00	-27.982.000,00
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	PAD	9.290.000,00	6.428.000,00	-2.862.000,00
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	PAD	56.255.000,00	43.851.000,00	-12.404.000,00
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	PAD	35.920.000,00	28.254.000,00	-7.666.000,00
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	PAD	18.515.000,00	13.465.000,00	-5.050.000,00
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	PAD	144.779.200,00	144.779.200,00	0,00
	KELURAHAN CISAUK		2.418.752.352,00	2.321.657.402,00	-97.094.950,00
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		1.212.380.100,00	1.138.417.770,00	-73.962.330,00
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		1.212.380.100,00	1.138.417.770,00	-73.962.330,00
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	PAD	11.049.000,00	8.618.000,00	-2.431.000,00
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	PAD	513.467.100,00	513.467.100,00	0,00
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	PAD	687.864.000,00	616.332.670,00	-71.531.330,00
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		165.804.650,00	144.790.950,00	-21.013.700,00
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		165.804.650,00	144.790.950,00	-21.013.700,00
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	PAD	165.804.650,00	144.790.950,00	-21.013.700,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		1.040.567.602,00	1.038.448.682,00	-2.118.920,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		242.293.700,00	240.174.700,00	-2.119.000,00

	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PAD	190.868.600,00	190.868.600,00	0,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	PAD	23.585.100,00	23.167.100,00	-418.000,00
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	PAD	13.440.000,00	11.739.000,00	-1.701.000,00
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	PAD	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		625.080.652,00	625.080.732,00	80,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PAD	76.570.152,00	76.570.232,00	80,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PAD	548.510.500,00	548.510.500,00	0,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		173.193.250,00	173.193.250,00	0,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	PAD	33.889.000,00	33.889.000,00	0,00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PAD	47.850.000,00	47.850.000,00	0,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	PAD	60.014.250,00	60.014.250,00	0,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	PAD	31.440.000,00	31.440.000,00	0,00
	JUMLAH		**23.060.107.845,00**	**22.437.418.277,00**	**-622.689.568,00**

Dilihat dari Tabel 2.2 terdapat Recofusing / Efisiensi Tahun 2025 sebesar Rp. -622.689.568,00 terdiri dari Kecamatan sebesar Rp. -525.594.618,00 dan Kelurahan sebesar Rp. -97.094.950,00 dengan rincian berikut :

- Kecamatan
  1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sebesar Rp. -9.620.000,00
  2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja S SKPD sebesar Rp. -1.980.000,00
  3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD sebesar Rp. -3.128.900,00
  4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD sebesar RP. -1.980.000,00
  5) Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD sebesar Rp. -4.619.450,00
  6) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi sebesar Rp. - 39.272.300,00
  7) Penyediaan Bahan Logistik Kantor sebesar Rp -47.508,00
  8) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan sebesar Rp. -12.824.400,00
  9) Fasilitasi Kunjungan Tamu sebesar Rp. -20.535.000,00
  10) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sebesar Rp. -33.600.000,00
  11) Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan sebesar Rp. -13.876.000,00
  12) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan sebesar Rp. -146.000,00
  13) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah

Kecamatan sebesar Rp. -172.896.860,00

14) Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara sebesar Rp. - 93.354.000,00
15) Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia sebesar Rp. -43.738.000,00
16) Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebesar Rp. -45.994.200,00
17) Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa sebesar Rp, - 2.862.000,00
18) Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa sebesar Rp. -12.404.000,00
19) Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa sebesar Rp. - 5.050.000,00
20) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan sebesar Rp. - 2.431.000,00
21) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan sebesar Rp. -71.531.330,00

- Kelurahan.
  1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan sebesar Rp. -21.013.700,00
  2. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan sebesar Rp. -71.531.330,00
  3. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik

     Indonesia sebesar Rp. -21.013.700,00
  4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor sebesar Rp. -418.000,00
  5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan sebesar Rp. -1.701.000,00

BAB III
RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN

3.1 Rencana Program dan Kegiatan

Bahan pertimbangan terhadap rumusan Rencana Program dan Kegiatan yang menjadi Prioritas Kecamatan Cisauk dalam Renja Perubahan 2025 ini adalah seperti yang telah tertuang dalam dokumen Renstra Kecamatan Cisauk 2024-2026 yang berfokus pada pencapaian visi dan misi Bupati Tangerang.

Kecamatan Cisauk mendapatkan pagu anggaran Perubahan sebesar (Rp 3.728.875.962) yaitu dari anggaran murni (efesiensi/recofussing) sebesar Rp 22.437.418.277 menjadi Rp 26.166.294.239 pada anggaran perubahan

Rencana Perubahan Program dan Kegiatan Kecamatan Cisauk untuk Tahun 2025 masih terdiri dari 6 (enam) program 16 (enam belas) kegiatan dan 35 (tiga puluh lima) sub kegiatan dengan pagu indikatif APBD-P sebesar Rp 26.166.294.239

Adapun Perubahan anggaran program dan kegiatan di Kecamatan Cisauk dapat dilihat pada tabel 3.1 rumusan rencana program dan kegiatan sebagai berikut :

Rincian Anggaran Belanja Program dan Kegiatan Perubahan Tahun 2025
Kecamatan Cisauk

Urusan Bidang Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		SKPD Penanggung Jawab
	Sebelum	sesudah	sebelum	sesudah	sebelum	sesudah	Berkurang/bertambah	sebelum	sesudah	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	90%	90%	10.112.146.208,00	10.252.887.782	140.741.574,00	APBD	APDB-P	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					88.083.400,00	93.678.900	5.595.500,00			
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					35.310.000,00	35.310.000	0,00			
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					10.565.000,00	10.565.000	0,00			
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					42.208.400,00	47.803.900	5.595.500,00			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					6.655.777.452,00	6.683.196.526	27.419.074,00			
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					6.648.187.452,00	6.675.606.526	27.419.074,00			
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD					7.590.000,00	7.590.000	0,00			
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					13.818.350,00	13.818.350	0,00			

Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD					13.818.350,00	18.437.800	4.619.450,00			
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daera					168.601.830,00	168.601.830	0,00			
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya					53.479.800,00	53.479.800	0,00			
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					115.122.030,00	115.122.030	0,00			
Administrasi Umum Perangkat Daerah					475.850.868,00	487.646.868	-55.210.908,00			
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					212.886.691,00	224.682.691	11.796.000,00			
Penyediaan Bahan Logistik Kantor					50.583.477,00	50.583.477	0,00			
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					40.835.700,00	40.835.700	0,00			
Fasilitasi Kunjungan Tamu					138.195.000,00	138.195.000	0,00			
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					33.350.000,00	33.350.000	0,00			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.254.306.808,00	1.350.306.808	96.000.000,00			
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					255.501.240,00	255.501.240	0,00			
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					998.805.568,00	1.094.805.568	96.000.000,00			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.455.707.500,00	1.455.638.500	-69.000,00			
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					126.491.000,00	126.491.000	0,00			

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					184.074.000,00	184.074.000	0,00			
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					127.400.000,00	127.400.000	0,00			
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					1.017.742.500,00	1.017.673.500	-69.000,00			
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					7.506.557.517,00	10.941.137.205	3.434.579.688,00			
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan					35.141.500,00	35.273.500	132.000,00			
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					35.141.500,00	35.273.500	132.000,00			
Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum					7.274.478.017,00	10.708.925.705	3.434.447.688,00			
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum					7.274.478.017,00	10.708.925.705	3.434.447.688,00			
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada CamaT					196.938.000,00	196.938.000	0,00			
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan					196.938.000,00	196.938.000	0,00			
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					1.851.434.600,00	1.900.050.600	48.616.000,00			

Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa					1.623.742.600,00	1.672.358.600	48.616.000,00			
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan					1.623.742.600,00	1.672.358.600	48.616.000,00			
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan					227.692.000,00	227.692.000	0,00			
Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara					227.692.000,00	227.692.000	0,00			
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					139.939.750,00	139.939.750	0,00			
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah					139.939.750,00	139.939.750	0,00			
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia					139.939.750,00	139.939.750	0,00			
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					268.905.600,00	283.119.200	14.213.600,00			
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah					268.905.600,00	283.119.200	14.213.600,00			

Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia					268.905.600,00	283.119.200	14.213.600,00			
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					236.777.200,00	236.777.200	0,00			
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					236.777.200,00	236.777.200	0,00			
Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa					6.428.000,00	6.428.000	0,00			
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa					43.851.000,00	43.851.000	-0,00			
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa					28.254.000,00	28.254.000	0,00			
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa					13.465.000,00	13.465.000	0,00			
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa					144.779.200,00	144.779.200	0,00			
KELURAHAN CISAUK										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					1.038.448.682	1.129.173.782	-9.243.988,00			
Administrasi Umum Perangkat Daerah					240.174.700	309.919.300	-828.498.470,00			
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					190.868.600	260.613.200	69.744.600,00			

Penyediaan Bahan Logistik Kantor					23.167.100	23.167.100	-418.000,00			
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					11.739.000	11.739.000	-1.701.000,00			
Fasilitasi Kunjungan Tamu					14.400.000	14.400.000	0,00			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					625.080.732	646.061.232	20.980.580,00			
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					76.570.232	76.570.232	80,00			
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					548.510.500	569.491.000	20.980.500,00			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					173.193.250	173.193.250	0,00			
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					33.889.000	33.889.000	0,00			
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					47.850.000	47.850.000	0,00			
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					60.014.250	91.454.250	31.440.000,00			
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					31.440.000	0,00	0,00			
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					1.138.417.770	1.138.417.770	-73.962.330,00			
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					1.138.417.770	1.138.417.770	-73.962.330,00			
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					8.618.000	8.618.000	0,00			

Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					513.467.100	513.467.100	0,00			
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					616.332.670	616.332.670	0,00			
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					144.790.950	144.790.950	0,00			
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah					. 144.790.950	144.790.950	0,00			
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia					. 144.790.950	144.790.950	0,00			
		JUMLAH			22.437.418.277	26.166.294.239	3.728.875.962,00			

BAB IV
PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Cisauk Kabupaten Tangerang Tahun 2025 adalah panduan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Cisauk untuk mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Tangerang yang merupakan manifestasi dari respon Kecamatan Cisauk terhadap kondisi lingkungannya baik eksternal maupun internal, yang senantiasa berubah begitu cepat dan memerlukan pengamatan yang akurat, serta diagnosa lingkungan yang efektif.

Rencana Kerja Perubahan ini menjadi acuan kerja dari semua bidang-bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing, diharapkan mampu memberikan kontribusi positif, dan dapat memperkecil atau menghilangkan dampak negatif dalam operasionalisasi SKPD.

54. Kecamatan Sepatan Timur

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan (*input*) sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Penyusunannya berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah (RKPD). Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026 dan menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setiap tahunnya.

Amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yaitu setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib menyusun Renja Perubahan sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Hal tersebut ditegaskan kembali dalam Peraturan Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah, yang dalam pasal 15 Ayat (1) mengamanatkan bahwa ”Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perubahan Perangkat Daerah”.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2000 Tanggal 29 Nopember 2000, tentang Pembentukan Kecamatan Jayanti, Kecamatan Kemiri, Kecamatan Sukadiri, Kecamatan Cisauk, dan

Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang, maka Kecamatan Sepatan Timur merupakan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang yang tugas pokok dan fungsinya telah diatur sebagai mana yang tercantum pada Peraturan Bupati Tangerang Nomor 113 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Kecamatan dan keluarahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang, memberikan kewajiban bagi Pemerintah Kecamatan Sepatan Timur untuk menyusun Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah (Renja Perubahan PD) Kecamatan Sepatan Timur Tahun 2025 ini disusun mengacu kepada visi, misi, arah kebijakan umum, strategi, prioritas, program dan kegiatan pembangunan Tahun 2025 Kabupaten Tangerang, yang tertuang pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 Kabupaten Tangerang.

Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Sepatan Timur Tahun 2025 merupakan Rencana Kerja Perubahan tahunan sebagai dokumen perencanaan operasional tahunan, dengan memperhatikan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang partisipatif, menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan yang diaktualisasikan dalam pelaksanaan pembangunan satu tahun berjalan, dimana pembangunan itu sendiri merupakan suatu proses yang terus menerus dilakukan dengan terencana untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Renja Perubahan Kecamatan Sepatan Timur Tahun 2025 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi, dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah.

Renja Perubahan Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang Tahun 2025 disusun dengan serangkaian tahapan dan kegiatan penyusunan sebagai berikut:

a. Persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah;
b. Penyusunan Rancangan Awal Renja Perubahan Perangkat Daerah;
c. Penyusunan Rancangan Renja Perubahan Perangkat Daerah;
d. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Lintas Perangkat Daerah (Lingkup Kecamatan);
e. Perumusan Rancangan Akhir Renja Perubahan Perangkat Daerah; dan
f. Penetapan Renja Perubahan Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja Perubahan Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 184, Tambahan Lembar Negara republik Indonesia Nomor 2000 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
b. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
c. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
e. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

g. Peraturan Pemerintah Nommor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
i. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Mencabut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011);
l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah;
m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
o. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050- 5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
p. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang;

q. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang Tahun 2011-2031
r. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 33 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan Dan Keluarahan;
s. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah;

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Sepatan Timur

Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2025 disusun untuk mewujudkan target kinerja tahun 2025 dengan mengalokasikan sumber daya yang dimiliki, serta untuk mengetahui penjabaran perencanaan pembangunan Kabupaten Tangerang khususnya Kecamatan Sepatan Timur selama 1 (satu) tahun anggaran yang dituangkan dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah.

Adapun penjabaran perencanaan pembangunan dalam Renja Perubahan Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang Tahun 2025 meliputi:

1. Program dan keegiatan Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang Tahun 2025;
2. Lokasi pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang Tahun 2025;
3. Indikator Kinerja Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang Tahun 2025;
4. Kelompok sasaran Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang Tahun 2025; dan
5. Pagu indikatif program dan kegiatan Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2025.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

1. Merencanakan program dan kegiatan Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang Tahun 2025;
2. Mengevaluasi pelaksanaan Renja Murni Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang;
3. Mengetahui masalah, tantangan dan Solusi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang Tahun sebelumnya;
4. Menjabarkan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sepatan Timur ke dalam Rencana Operasional tahunan;
5. Menyediakan arahan/pedoman bagi aparatur Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang dalam Menyusun Rencana Kerja Perubahan dan Anggaran Kecamatan Sepatan Timur Tahun Anggaran 2025
6. Menjadi alat ukur kinerja penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang.

1.4 Sistematika Penulisan

Sebagaimana telah dirumuskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah, dokumen Rencana Kerja Perubahan Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2025 disusung dengan Sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini dijabarkan tentang Renja Perubahan Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja

Perubahan dengan RKPD dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, serta proses penyusunan Renja Perubahan.

BAB II : HASIL EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II KECAMATAN SEPATAN TIMUR TAHUN 2024

Bab ini berisi uraian mengenai hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Sepatan Timur Tahun 2023 (n-2) serta proyeksi capaian Rencana Strategis Tahun 2024 (n-1). Selain itu, bab ini juga memuat analisis kinerja pelayanan Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang Tahun 2023, serta isu-isu penting yang muncul dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Sepatan Timur. Lebih lanjut, bab ini menyajikan reviu terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Sepatan Timur Tahun Anggaran 2025, serta penelaahan terhadap usulan program dan kegiatan masyarakat yang bersumber dari hasil rembuk RW, musrenbang, maupun pokok-pokok pikiran hasil reses DPRD..

BAB III : RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN KECAMATAN SEPATAN TIMUR TAHUN 2025

Pada bab ini berisi penjabaran program, kegiatan, dan subkegiatan yang direncanakan beserta target kinerja dan jumlah dana yang dibutuhkan untuk mendanai program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2025.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisi uraian penutup yang terdiri atas catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II KECAMATAN SEPATAN TIMUR TAHUN 2024

2.1 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang memiliki susunan organisasi terdiri atas :

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Kecamatan Sepatan Timur



Sumber : Dokumen Selayan Pandang Profil Kecamatan

Dalam menyelenggarakan fungsinya sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang yang di atur dengan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 33 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas da Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang, susunan organisasi Kecamatan terdiri atas :

1. Camat;
2. Sekretariat Kecamatan, terdiri atas:
   a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
   b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
3. Seksi Pemerintahan;
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
5. Seksi Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan masyarakat;
6. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa;
7. Seksi Pelayanan;
8. Kelurahan; dan
9. Kelompok Jabatan Fungsional

Tercapainya suatu kegiatan sangat ditentukan oleh sumber daya manusia yang tersedia. Dalam rangka menyelenggarakan kegiatan-kegiatan Pemerintahan baik Pembangunan dan Pelayanan Kemasyarakatan lainnya di Wilayah Kecamatan Sepatan di bantu oleh personil/pegawai pada Kantor Kecamatan Sepatan, Adapun personil Kantor Kecamatan Sepatan Timur berjumlah 53 orang terdiri dari PNS 17 orang, CPNS 1 orang, PPPK 2 orang, dan tenaga Magang 33 orang dengan susunan kepegawaian sebagai berikut :

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Kecamatan Sepatan Timur

No	Uraian	Laki-laki	Perempuan	Total
1	Jumlah Pegawai			
	PNS	15	5	20
	CPNS	-	1	1
	NON ASN	21	12	33
	Jumlah	36	18	56
2	Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan:			
	Golongan IV	3	2	5
	Golongan III	10	6	16
	Golongan II	2	-	2
	Golongan I	-	-	-
	NON ASN	21	12	33
	Jumlah	36	18	56

Sumber : simasn.tangerangkab.go.id

Pada tahun 2025 Kecamatan Sepatan Timur melaksanakan program dan kegiatan dengan dukungan anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Tangerang sebesar Rp. 23.018.207.597,00 (Dua puluh tiga milyar delapan belas juta dua ratus tujuh ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah), dengan Realisasi Anggaran sampai dengan Tanggal 23 Juni Tahun 2025 sebesar Rp. 10.833.504.245,00 (Sepuluh milyar delapan ratus tiga puluh tiga juta lima ratus empat ribu dua ratus empat puluh lima rupiah) atau persentase realisasi sebesar 47.06%. Adapun target dan realisasi anggaran triwulan II tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang Tahun 2025

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Definisi Operasional	Satuan	Target
1	2	3	4	5	6
1	Mewujudkan Birokrasi yang Responsif, Akuntabel dan Inovatif	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	82.25

Dari sebanyak 1 (satu) sasaran dengan indikator yang diperjanjikan didukung oleh jumlah Program sebanyak 6 (enam) Program yang berkaitan langsung dengan pencapaian kinerja dan didukung oleh anggaran belanja sebesar Rp23.018.207.597,00,-

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sampai dengan Triwulan II Tahun Berjalan dan Proyeksi Capaian Rencana Strategis Tahun 2025

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah dan pencapaian kinerja Renstra Perangkat Daerah ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi capaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Perangkat Daerah,

serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Jenis program dan kegiatan yang direncanakan di dalam Renja Perubahan Kecamatan Sepatan Timur berdasarkan Renstra Kecamatan Sepatan Timur Tahun 2019-2023 yang terdiri dari 5 (lima) Program dan 12 (dua belas) Kegiatan, serta Renstra Kecamatan Sepatan Timur Tahun 2024-2026 yang terdiri dari 6 (enam) Program, dan 12 (dua belas) Kegiatan. Review didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perubahan Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya, laporan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah, dan Perkiraan pelaksanaan DPA-Perangkat Daerah tahun berjalan yang baru disahkan.

Fungsi evaluasi ini adalah dalam rangka penyediaan informasi yang berguna untuk menentukan strategi dan kegiatan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Sepatan Timur Tahun Anggaran 2025. Evaluasi atau reviu dilakukan terhadap realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Sepatan Timur Tahun 2024. Hasil Evaluasi Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Sepatan Timur dan Jajaran tersajikan dalam Lampiran 1 : Isian Hasil Evaluasi Renja Perubahan Perangkat Daerah Tahun Lalu (Sampai dengan Tahun 2025).

Tabel 2.2 (T.C-29)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perubahan Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang

Nama OPD : Kecamatan Sepatan Timur

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (n-2) 2023			Target program dan kegiatan (Renja Perubahan Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Kinerja Renja Perubahan PD Tahun (n-2) 2023	Realisasi Kinerja Renja Perubahan PD Tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	300%	300%
7.01.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	5	5	5	100,00%	5	15	300%
7.01.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan	2	2	2	2	100,00%	2	6	300%
7.01.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang difasilitas	35	31	34	34	100,00%	35	100	286%
7.01.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	8	8	8	8	100,00%	8	24	300%
7.01.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang	3	3	3	3	100,00%	3	9	300%
7.01.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	4	3	3	3	100,00%	4	10	250%

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (n-2) 2023			Target program dan kegiatan (Renja Perubahan Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Kinerja Renja Perubahan PD Tahun (n-2) 2023	Realisasi Kinerja Renja Perubahan PD Tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar Kecamatan Sepatan	91,35%	87,00%	89,80%	89,50%	99,66%	91,35%	267,85%	293%
		Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik Kecamatan Sepatan	93%	85%	90,00%	90,00%	100%	93%	268%	288%
7.01.02.2.02	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Tersedianya pemenuhan sarana dan prasarana Paten di Kecamatan	2	2	3	3	100%	2	7	350%
7.01.02.2.03	Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah infrastruktur yang dipelihara	14	5	4	4	100%	14	23	164%
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaa Kec. Sepatan	85%	75%	80%	80%	100%	85%	240%	282%
7.01.03.2.01	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan/pemberdayaa	10	10	10	10	100%	10	30	300%
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana Kelurahan yang dibangun	12	10	12	12	100%	12	34	283%

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (n-2) 2023			Target program dan kegiatan (Renja Perubahan Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Kinerja Renja Perubahan PD Tahun (n-2) 2023	Realisasi Kinerja Renja Perubahan PD Tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	100%	60%	75%	75%	100%	100%	235%	235%
7.01.04.2.01	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	4	4	4	4	100%	4	12	300%
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	60%	-	-	-	-	60%	60%	100%
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti pembinaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	3	-	-	-	-	3	3	100%
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Presentase Desa Dengan Laporan Administrasi baik	90%	77%	85,71%	85,71%	100%	90%	252,71%	281%
7.01.06.2.01	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Sub Kegiatan	Jumlah Desa yang difasilitasi	8	8	8	8	100%	8	21	300%

Tabel 2.3
REKAPITULASI ANGGARAN DAN LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN (s/d TRIWULAN II) KECAMATAN SEPATAN TIMUR TAHUN 2025

KODE	URAIAN	Anggaran	LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN				SISA ANGGARAN
			Anggaran/Keuangan		Fisik		
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	
	KECAMATAN SEPATAN TIMUR						
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	7.639.124.497,00	7.639.124.497,00	3.941.975.045,00	100,00	51,60	(3.697.149.452,00)
	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASIKINERJA PERANGKAT DAERAH	152.509.500,00	152.509.500,00	80.405.375,00	100,00	52,72	(72.104.125,00)
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	61.323.750,00	61.323.750,00	30.718.125,00	100,00	50,09	(30.605.625,00)
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	39.534.500,00	39.534.500,00	19.936.000,00	100,00	50,43	(19.598.500,00)
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	51.651.250,00	51.651.250,00	29.751.250,00	100,00	57,60	(21.900.000,00)
	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	5.063.061.641,00	5.063.061.641,00	2.624.700.190,00	100,00	51,84	(2.438.361.451,00)

KODE	URAIAN	Anggaran	LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN				SISA ANGGARAN
			Anggaran/Keuangan		Fisik		
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.014.301.791,00	4.711.970.289,00	2.599.922.340,00	100,00	51,85	(2.414.379.451,00)
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	48.759.850,00	48.759.850,00	24.777.850,00	100,00	50,82	(23.982.000,00)
	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	59.487.600,00	59.487.600,00	59.460.600,00	100,00	99,95	(27.000,00)
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangundangan	59.487.600,00	59.487.600,00	59.460.600,00	100,00	99,95	(27.000,00)
	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	522.721.600,00	522.721.600,00	402.554.100,00	100,00	77,01	(120.167.500,00)
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	13.762.500,00	13.762.500,00	13.762.500,00	100,00	100,00	(0,00)
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	340.497.800,00	340.497.800,00	285.408.200,00	100,00	83,82	(55.089.600,00)
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	30.234.600,00	30.234.600,00	10.914.600,00	100,00	36,10	(19.320.000,00)
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	34.687.600,00	34.687.600,00	34.510.800,00	100,00	99,49	(176.800,00)
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	23.215.100,00	23.215.100,00	6.975.000,00	100,00	30,05	(16.240.100,00)

KODE	URAIAN	Anggaran	LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN				SISA ANGGARAN
			Anggaran/Keuangan		Fisik		
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	49.020.000,00	49.020.000,00	34.800.000,00	100,00	70,99	(14.220.000,00)
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	31.304.000,00	31.304.000,00	16.183.000,00	100,00	51,70	(15.121.000,00)
	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAH	1.271.322.688,00	1.271.322.688,00	621.425.000,00	100,00	48,88	(649.897.688,00)
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	176.301.120,00	176.301.120,00	97.925.000,00	100,00	55,54	(78.376.120,00)
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.095.021.568,00	463.716.000,00	523.500.000,00	100,00	47,81	(571.521.568,00

KODE	URAIAN	Anggaran	LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN				SISA ANGGARAN
			Anggaran/Keuangan		Fisik		
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	
	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	570.021.468,00	570.021.468,00	149.554.500,00	100,00	26,24	(420.466.968,00)
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	70.300.484,00	70.300.484,00	36.490.500,00	100,00	51,91	(33.809.984,00)
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	135.620.984,00	135.620.984,00	88.964.000,00	100,00	65,60	(46.656.984,00)
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.100.000,00	24.100.000,00	24.100.000,00	100,00	100,00	0,00
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	340.000.000,00	340.000.000,00	0,00	100,00	0,00	(340.000.000,00)
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	13.270.026.700,00	13.270.026.700,00	5.812.380.900,00	100,00	43,80	(7.457.645.800,00)

KODE	URAIAN	Anggaran	LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN				SISA ANGGARAN
			Anggaran/Keuangan		Fisik		
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	
	PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN	27.026.700,00	27.026.700,00	8.638.900,00	100,00	31,96	(18.387.800,00)
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	27.026.700,00	27.026.700,00	8.638.900,00	100,00	31,96	(18.387.800,00)
	KOORDINASI PEMELIHARAAN PRASARANA DAN SARANA PELAYANAN UMUM	13.243.000.000,00	13.243.000.000,00	5.803.742.000,00	100,00	43,82	(7.439.258.000,00)
	Koordinasi / Sinergi dengan Perangkat Daerah dan / atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	13.243.000.000,00	13.243.000.000,00	5.803.742.000,00	100,00	43,82	(7.439.258.000,00)
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	911.237.448,00	911.237.448,00	907.805.478,00	100,00	100,00	(3.431.970,00)

KODE	URAIAN	Anggaran	LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN				SISA ANGGARAN
			Anggaran/Keuangan		Fisik		
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	
	KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA	911.237.448,00	911.237.448,00	907.805.478,00	100,00	100,00	(3.431.970,00)
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	58.087.096,00	58.087.096,00	58.087.096,00	100,00	100,00	0,00
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	853.150.352,00	853.150.352,00	849.718.382,00	100,00	100,00	(3.431.970,00)
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	215.162.793,00	215.162.793,00	214.680.043,00	100,00	100,00	(482.750,00)
	KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	215.162.793,00	215.162.793,00	214.680.043,00	100,00	100,00	(482.750,00)
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	215.162.793,00	215.162.793,00	214.680.043,00	100,00	100,00	(482.750,00)

KODE	URAIAN	Anggaran	LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN				SISA ANGGARAN
			Anggaran/Keuangan		Fisik		
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	215.102.597,00	215.102.597,00	215.102.597,00	100,00	100,00	0,00
	FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	215.102.597,00	215.102.597,00	215.102.597,00	100,00	100,00	0,00
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	215.102.597,00	215.102.597,00	215.102.597,00	100,00	100,00	0,00
	JUMLAH BELANJA DAERAH	**23.018.207.597,00**	**23.018.207.597,00**	**10.829.628.965,00**	**100,00**	**47,05**	**(12.188.578.632,00)**

Dalam upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja, Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tahun 2025 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Grafik 2.4 Capaian Indikator Kinerja
Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang Tahun 2025

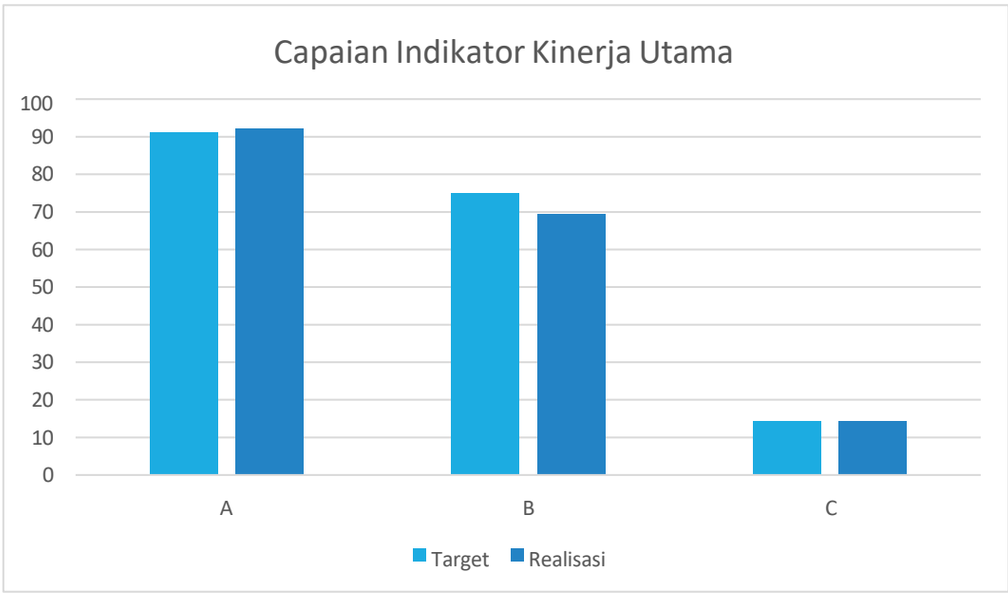

Sumber : ESAKIP 2024 (sakip.tangerangkab.go.id)

A: Meningkatnya Pelayanan Masyarakat (IKM)
B: Meningkatnya akuntabilitas Perangkat Daerah (Nilai AKIP) C: Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum

Berdasarkan grafik diatas terlihat bahwa dari 3 indikator kinerja utama di tahun 2024, capaian tertinggi terdapat pada pemenuhan indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 92,15 dari target 91.08 atau sebesar 101,17%, dan capaian terendah pada indikator Meningkatkatnya Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum sebesar 14,18 dari target 14,29. Tidak tercapainya target tersebut disebabkan oleh....

Dari uraian analisis di atas pada tabel 2.1 dan grafik 2.1 dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian kinerja indikator utama pada Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Sepatan Timur Tahun 2024 adalah 100,01% dengan kategori mencapai target. Sedangkan realisasi anggaran adalah sebesar Rp. *14.893.105.049,00* (98.00%) dengan kategori sangat tinggi.

Pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Sepatan Timur dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.4 (T.C-30)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat	89.55	89.60	89.70	89.80	81,14	89.50	89.70	89.80	Belum sesuai target capaian Renstra PD
2	Nilai AKIP Kecamatan Sepatan Tmur	Nilai AKIP	Hasil Nilai AKIP	73.53	75.05	76.10	78.15	74.60	55.20	76.10	78.15	Di Tahun 2023 mengalami penurunan nilaidikarenakan adanyaperubahan indicatorpenilaian dari tim APIP
3	Presentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Presentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Hasil Presentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	60	75	100	100	60	75	100	100	Telah sesuai target namun di Tahun 2024 sudah tidak menjadi standar indikator kinerjautama kecamatan

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang

Otonomi Daerah merupakan upaya mewujudkan Pemerintahanan yang Good Governance dan Clean Governance. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan aparatur yang mempunyai integritas, akuntabilitas, dan transparansi yang tinggi. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang harus mampu menjawab setiap tantangan, mengambil serta menerapkan peluang yang ada untuk mendukung pencapaian RPD 2024-2026 Kabupaten Tangerang. Dalam hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Misi 5: Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, demokratis, dan partisipatif.

a. Permasalahan pelayanan perangkat daerah antara lain:
   1. Kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang;
   2. Pembinaan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi masih belum maksimal;
   3. Regulasi pelayanan masih tumpang tindih;
   4. Sarana dan prasarana pelayanan masih belum optimal;
   5. Pembangunan infrastruktur jalan masih terbatas dengan anggaran;
   6. Peran serta masyarakat masih minim;
   7. Fasilitasi terhadap UMKM masih belum maksimal;
   8. Tata kelola SDM dalam hal pemenuhan, beban kerja dan peningkatan kompetensi belum optimal;
   9. Upaya kolaborasi dengan instansi vertikal masih perlu ditingkatkan;
   10. Forum koordinasi wilayah masih perlu ditingkatkan untuk menemukan dan mengantisipasi permasalahan dan kebutuhan masyarakat.

b. Faktor penghambat untuk pencapaian Misi 5 antara lain:
   1. Belum maksimalnya kolaborasi antar perangkat daerah;
   2. Belum maksimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat

daerah, dikarenakan keterbatasan anggaran;
3. Belum optimalnya adaptasi setiap kebijakan baru;
4. Belum optimalnya upaya pembinaan SDM baik internal perangkat daerah, maupun perangkat desa;
5. Masih belum optimalnya analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja terhadap tugas tambahan diluar tugas pokok;
6. Masih terbatasnya jumlah SDM Perangkat Daerah;
7. Belum maksimalnya tindak lanjut atas hasil pembinaan, pengawasan, dan pengendalian oleh instansi terkait;
8. Belum maksimalnya pemanfaatan kader PKK;
9. Belum adanya analisa terhadap pengembangan fasiilitas terhadap UMKM;
10. Belum optimalnya kemampuan tata kelola manajemen perkantoran dan kegiatan;
11. Belum optimalnya tata kelola asset dan identifikasi kebutuhan asset.

c. Faktor Pendorong untuk pencapaian Misi 5 antara lain:
1. Tersedianya berbagai regulasi perihal pelayanan publik;
2. Maraknya perkembangan teknologi yang dapat diadaptasi oleh perangkat daerah untuk pemenuhan tugas dan fungsi;
3. Kuatnya Anggaran APBD untuk mendorong ketercapaian target;
4. Rutinnya penyusunan Anjab dan ABK;
5. Banyaknya kualitas SDM yang berada di usia muda;
6. Cakapnya kader-kader PKK dalam melaksanakan tugas dan fungsi;
7. Rutinnya pelaksanaan koordinasi dengan instansi vertikal dan horizontal;
8. Tersedianya regulasi untuk pencapaian tata kelola pemerintahan yang baik;
9. Banyaknya media dan sarana yang dapat memberikan kesempatan perangkat daerah berpartisipasi terhadap kebutuhan publik.

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang, yaitu:

a. Tantangan antara lain:
1. Pemenuhan SDM yang cakap sesuai dengan tugas dan fungsinya;
2. Integrasi sistem informasi;
3. Pengembangan fasilitas pelayanan;
4. Adaptasi dengan perkembangan teknologi;
5. Pengembangan layanan publik sesuai tugas dan fungsi;
6. Optimalisasi kegiatan pembinaan pegawai;
7. Fasilitasi kebetuhan dan keperluan bagi UMKM;
8. Heterogenitas penduduk Kecamatan Sepatan Timur yang menuntut kebutuhan yang beragam;
9. Optimaliasi pengembangan dan pemanfaatan data pelayanan;
10. Optimalisasi dan sinkronisasi dokumen perencanaan;
11. Pemanfaatan Forum legal yang ada di wilayah Kecamatan;
12. Pemenuhan ketentraman dan ketertiban umum
13. Prioritas pemenuhan inftastruktur;
14. Prioritas pemberdayaan masyarakat untuk menurunkan

kemiskinan ekstrem;
15. Prioritas penurunan angka stunting;
16. Penguatan SDM Kecamatan;
17. Penguatan Sistem Pelayanan.

b. Peluang antara lain:
1. Dukungan anggaran dari pemerintah kabupaten melalui APBD;
2. Kemudahan akses teknologi dan informasi pelayanan;
3. Kemudahan akses teknologi dan informasi perencanaan;
4. Perbaikan berkelanjutan atas tata kelola pemerintahan;
5. Dukungan akses Pendidikan dan Pelatihan dari Instansi Vertikal bagi Aparatur Kecamatan;
6. Kerjasama yang kuat bersama instansi vertikal dan mitra;
7. Heterogenitas penduduk yang mampu membawa perbaikan dan pengembangan bagi pelayanan;
8. Dukungan instansi vertikal yang besar melalui koordinasi dan fasilitasi setiap kebutuhan masyarakat;

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan diprioritaskan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah tersebut di masa yang akan datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal ini jika tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat.

Pada tahun 2024 – 2026 pelaksanaan fungsi dan tugas Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang diprioritaskan terhadap isu-isu strategis yaitu:

1. Penanganan Kemisikinan dan Pengangguran
   1) Masih kurangnya kegiatan usaha produktif dikalangan masyarakat;
   2) Kurang optimalnya kelompok usaha masyarakat untuk memecahkan ekonomi masyarakat;
   3) Kurangnya pembinaan kelompok UMKM Masyarakat;
   4) Kurangnya sarana dan prasarana yang berfokus pada kelompok UMKM;
   5) Lemahnya penguasaan teknologi informasi dalam mengembangkan pemasaran hasil-hasil UMKM;
   6) Kurangnya pelatihan-pelatihan bagi kelompok tenaga kerja usia produktif;
   7) Sulitnya akses permodalan;
   8) Belum optimalnya keberadaan Pasar Regional;
   9) Masih rendahnya pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan kurangnya pelatihan kepada masyarakat pelaku UMKM;
   10) Belum tersedianya data pelaku usaha yang akurat
2. Peningkatan Kualitas dan Pemerataan Pelayanan Pendidikan, Kesehatan dan Sosial
   1) Kurangnya fasilitas prasaranan dan sarana Pendidikan formal khususnya Sekolah Dasar;
   2) Kurangnya pustu yang mudah dijangkau oleh masyarakat sekitar;
   3) Masih rendahnya tingkat pemahaman tentang Kesehatan dan

Pola Hidup Bersih Sehat (PHBS);
4) Belum lengkapnya alat Kesehatan di setiap Posyandu;

5) Kurangnya pembinaan pada organisasi-organisasi keagamaan, sosial dan kepemudaan serta ketentraman dan ketertiban umum;

3. Pemerataan Infrastruktur dan Pembangunan Berkelanjutan
   1) Belum terpadunyan pembangunan infrastruktur jalan dan saluran air sehinggan menyebabkan pembuangan air tidak teratur dan berpotensi banjir;
   2) Masih rendahnya pembangunan infrastuktur;
   3) Masih kurangnya tenaga ahli perencanaan konstruksi di kecamatan;
   4) Belum maksimalnya penyediaan air bersih dari PDAM;
   5) Masih kurangnya penerangan jalan;
4. Pengelolaan Persampahan dan Lingkungan
   1) Masih rendahnya pemahaman masyrakat terhadap pengelolaan persampahan dilingkungan masing-masing;
   2) Masih terbatasnya tempat pembuangan sampah disetiap lingkungan;
   3) Belum adanya sistem pengolahan sampah terpadu;
   4) Masih kurangnya sarana dan prasaranan dalam hal pengolahaan dan pengelolaan sampah.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerjan Perubahan Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang

Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah (RKPD) Kecamatan Sepatan Tahun 2025 merupakan Rencana Kerja Perubahan tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam arah kebijakan RPD Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026 yang dijabarkan dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026. Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah (RKPD) ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri dalan Negeri Nomor

54 Tahun 2010, Pasal 287 ayat 2 dalam hal penyusunan RKPD yang belum memiliki RPJMD menyatakan "Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota, penyusunan RKPD

berpedoman pada sasaran pokok arah kebijakan RPJPD Kabupaten/Kota dan mengacu pada RPJMD Propinsi untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan daerah Kabupaten/Kota dan Propinsi, dengan tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Perubahan Pembangunan Daerah (Ranwal RKPD) Tahun 2025, agar di dalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antar dokumen perencanaan", sebagaimana dijabarkan dalam tabel ini.

Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD Tahun 2025 Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang Tabel 2.5 (T-C.31)

NO	Rancangan Awal RKPD					Rancangan Akhir RKPD					
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Capaian Target	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Capaian Target	Pagu Indikatif	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	KECAMATAN					Kecamatan					
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
7.01.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
7.01.01.2.01.0001	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Sepatan Timur	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	82.422.500,00	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Sepatan Timur	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	61.323.750,000	
7.01.01.2.01.0006	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Sepatan Timur	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	56.908.750,00	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Sepatan Timur	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	39.534.500,00	
7.01.01.2.01.0007	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Sepatan Timur	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	70.152.500,00	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Sepatan Timur	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	51.651.250,00	
7.01.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
7.01.01.2.02.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Sepatan Timur	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35	5.033.782.470,00	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Sepatan Timur	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37	5.579.815.529,00	
7.01.01.2.02.0007	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Kec. Sepatan Timur	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/	2	68.807.500,00	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Kec. Sepatan Timur	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/	1	48.759.850,00	

	Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			
7.01.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					
7.01.01.2.05.0011	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Sepatan Timur	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50	102.309.500,00	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Sepatan Timur	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	45	59.487.600,00	
7.01.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah					Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah					
7.01.01.2.06.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Kec. Sepatan Timur	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5	8.925.000,00	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Kec. Sepatan Timur	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	8.263.000,00	
7.01.01.2.06.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Sepatan Timur	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9	305.210.000,00	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Sepatan Timur	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	540.497.800,00	
7.01.01.2.06.0003	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kec. Sepatan Timur	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10	30.234.600,00	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kec. Sepatan Timur	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10	30.234.600,00	

7.01.01.2.06.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Sepatan Timur	Jumlah Paket Bahan Logistik	24	34.182.500,00	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Sepatan Timur	Jumlah Paket Bahan Logistik	24	34.687.600,00	
			Kantor yang Disediakan					Kantor yang Disediakan			
7.01.01.2.06.0005	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec. Sepatan Timur	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4	25.157.500,00	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec. Sepatan Timur	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7	23.215.100,00	
7.01.01.2.06.0008	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec. Sepatan Timur	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	24	60.600.000,00	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec. Sepatan Timur	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	24	49.020.000,00	
7.01.01.2.06.0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Sepatan Timur	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2	60.000.000,00	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Sepatan Timur	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2	31.304.000,00	
7.01.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
7.01.01.2.08.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Sepatan Timur	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3	176.839.200,00	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Sepatan Timur	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2	176.301.120,00	
7.01.01.2.08.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Sepatan Timur	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	15	1.015.128.000,00	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Sepatan Timur	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	1.199.421.568,00	
7.01.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					

7.01.01.2.09.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Sepatan Timur	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6	73.521.600,00	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Sepatan Timur	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5	70.300.484,00	
7.01.01.2.09.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Sepatan Timur	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1	90.090.600,00	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Sepatan Timur	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2	135.620.984,00	
7.01.01.2.09.0006	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Sepatan Timur	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4	24.100.000,00	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Sepatan Timur	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7	24.100.000,00	
7.01.01.2.09.0009	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Sepatan Timur	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	353.700.000,00	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Sepatan Timur	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	340.000.000,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					
7.01.02.2.02	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan					Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan					

7.01.02.2.02.0003	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Sepatan Timur	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2	37.604.500,00	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Sepatan Timur	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2	27.026.700,00	
7.01.02.2.03	Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum					Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum					
7.01.02.2.03.0001	Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat		Jumlah dokumen koordinasi/siner	40	4.768.000.000,00	Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan	Kec. Sepatan Timur	Jumlah dokumen koordinasi/siner	1	13.313.000.000,00	
	Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum		gi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum			Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum		gi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum			
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					
7.01.03.2.01	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa					Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa					
7.01.03.2.01.001	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. Sepatan Timur	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10	77.028.500,00	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. Sepatan Timur	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10	78.662.000,00	

7.01.03.2.01.003	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Sepatan Timur	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10	1.226.816.750,00	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Sepatan Timur	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1	1.464.771.400,00	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					
7.01.04.2.01	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					
7.01.04.2.01.0001	Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Sepatan Timur	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal	5	206.819.500,00	Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Sepatan Timur	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal	4	141.965.250,00	
			di Wilayah Kecamatan					di Wilayah Kecamatan			
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					
7.01.05.2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah					Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah					

7.01.05.2.01.0001	Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kec. Sepatan Timur	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	50	201.577.000,00	Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kec. Sepatan Timur	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	40	161.289.750,00	
7.01.05.2.01.0008	Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec. Sepatan Timur	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	3	81.930.000,00	Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec. Sepatan Timur	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	7	58.890.000,00	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					
7.01.06.2.01	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					
7.01.06.2.01.0002	Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Sepatan Timur	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka	7	114.190.000,00	Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata	Kec. Sepatan Timur	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka	7	101.182.500,00	

			Administrasi Tata Pemerintahan Desa			Pemerintahan Desa		Administrasi Tata Pemerintahan Desa			
7.01.06.2.01.0007	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Kec. Sepatan Timur	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	7	79.415.000,00	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Kec. Sepatan Timur	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	7	61.743.000,00	
7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kec. Sepatan Timur	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	7	53.470.000,00	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kec. Sepatan Timur	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	7	40.552.500,00	

2.4.1 Musrenbang Tingkat Kecamatan

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang di laksanakan pada hari Senin, 5 Februari 2024, sesuai dengan jadwal yang sudah dengan Surat Edaran Bupati Tangerang Tanggal 15 Januari 2024 Nomor: B/900.1.2.1/187/I/BAPPEDA/2024 tentang Penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan Pedoman Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tahun 2025. Musrenbang tingkat Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang di hadiri oleh Bidang Infrastruktur dan Wilayah Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang, tokoh agama, tokoh masyarakat, dewan, dan seluruh desa di Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang. Dari hasil musrenbang tersebut menghasilkan 50 usulan Prioritas, sebagaimana terlampir pada lampiran III.

2.4.2 Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah

Rancangan Awal Rencana Kerja Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2025 disusun berdasarkan evaluasi hasil Capaian Indikator Kinerja tahun 2024. Setiap seksi dab sub bagian melakukan penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun Anggaran 2025 berdasarkan penjabaran Rencana Strategis Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029 yang nomenklaturnya mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Sehubungan dengan surat edaran Pj. Bupati Tangerang Nomor 8/900.1.2.1/187/I/BAPPEDA/2024 tentang Penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan Pedoman Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tahun 2025, bahwa Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang mengusulkan pagu indikatif Rancangan Awal Rencana Kerja Perubahan TA 2025 dalam berkas daring (*drive google)* sesuai arahan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda). Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang TA 2025 didasari oleh surat edaran Bupati Tangerang Nomor 8/900.1.2.1/187/I/BAPPEDA/2024 tentang Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Perangkat Daerah dan Pedoman Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tahun 2025. Dalam Rancangan Awal Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2025 yang disusun, alokasi anggaran dikelompokan berdasarkan program, seksi dan sub bagian, dan sumber anggaran.

a. Alokasi anggaran program

Tabel 2.2
Alokasi Anggaran Program Pada Rancangan Awal Rencana Kerja Perubahan TA 2025

Kode	Nama Program	Pagu Hasil Input Ranwal Renja Perubahan TA 2025	Persentase
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	4.805.604.500,00	33,09
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	1.303.845.250,00	8,98
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	206.819.500,00	1,42
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	283.507.000,00	1,95
7.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	247.075.000,00	1,70
7.01.XX	Program Penunjang	7.676.909.720,00	52,85
	Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		
Total		14.523.760.970,00	100,00

Berdasarkan tabel diatas program dengan anggaran terbesar adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Rp 7.676.909.720,00,- (Tujuh Milyar enam ratus juta sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) atau 52.85% dari total pagu hasil input Rancangan Awal Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2025. Program tersebut memiliki anggaran terbesar karena terdapat sub Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan total anggaran sebesar Rp 5.033.782.470,00,00,- (Tiga belas milyar dua ratus empat puluh tiga juta rupiah) atau 34.95% dari total pagu hasil input Rancangan Awal Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2025.

b. Alokasi anggaran seksi dan sub bagian

Tabel 2.3
Alokasi Anggaran per Seksi dan Sub Bagian pada Rancangan Awal Rencana Kerja Perubahan Tahun Anggaran 2025

No	Kelompok Unit Kerja	Pagu Hasil Input Ranwal Renja Perubahan TA 2025	Persentase
1	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	5.279.641.791,00	22,50
2	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	2.480.950.656,00	10,57
3	Seksi Pelayanan	13.279.004.500,00	56,61
4	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	1.714.723.500,00	7,31
5	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Perlindungan Masyarakat	175.391.500,0	0,75
6	Seksi Pemerintahan	266.822.000,00	1,13
7	Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	259.815.000,00	1,10
	Total	23.456.348.947,00	100,00

Berdasarkan tabel diatas, seksi/sub bagian dengan anggaran terbesar adalah Sub Bagian Pelayanan yaitu Rp. 13.279.004.500,00,- (Tiga belas milyar dua ratus tujuh puluh sembilan jutaa empat ribu lima ratus rupiah), atau 56,61% dari total pagu hasil input Rancangan Awal Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2025. Seksi Pelayanan memiliki anggaran terbesar karena terdapat sub kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum yang dialokasikan untuk anggaran belanja sarana dan prasarana pelayanan umum Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang sebesar Rp. 13.243.000.000,00,- (Tiga belas milyar dua ratus empat puluh tiga juta rupiah) atau 56.45% dari total pagu hasil input Rancangan Awal Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2025.

c. Alokasi anggaran berdasarkan sumber anggaran

Tabel 2.4
Alokasi Anggaran per Sumber Anggaran pada Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun Anggaran 2025

No	Jenis Pagu	Pagu Hasil Input Ranwal Renja TA 2025	Persentase
1	APBD MURNI	14.168.703.034,00	100,00
	Total	14.168.703.034,00	100,00

Berdasarkan tabel diatas, sumber anggaran pada Rancangan

Awal Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2025 adalah sepenuhnya dibiayai oleh APBD-P Pemerintah Kabupaten Tangerang.

2.4.3 Forum Koordinasi Perangkat Daerah

Dalam rangka menindaklanjuti surat dari Kepala Bappeda Nomor : 000.7.4/144/11/Bappeda/2024 tentang Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Tahun 2024 maka pada tanggal 27 Februari 2024 Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang ikut serta pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Tahun 2024 dalam rangka pembahasan Rancangan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025.

Hal-hal yang disepakati dalam Forum Perangkakt Daerah/Lintas Perangkat Daerah Tahun 2024 diantaranya:

a. Fokus penganggaran untuk penurunan stunting, setiap kecamatan diminta untuk menganggarkan anggaran sensitif dan spesifik dalam peran serta penurunan stunting;
b. Fokus penganggaran untuk penanganan kemiskinan ekstrem, setiap kecamatan diminta untuk menganggarkan kegiatan operasi pasar (bazar murah) minimal 2 kali dalam satu tahun;
c. Fokus pengganggaran untuk penyelenggaraan bedah rumah tidak layak huni (RTLH) dalam rangka penanganan kemiskinan ekstrem;
d. Keselarasan program/kegiatan/sub kegiatan antar Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah termasuk keselarasan program/kegiatan/sub kegiatan Perangkat Daerah;
e. Kesesuaian pendanaan program/kegiatan/sub kegiatan prioritas untuk masing-masing Perangkat Daerah;
f. Berita acara ini beserta lampirannya dijadikan sebagai bahan penyusunan Rancangan Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang Tahun 2025.

Total usulan anggaran Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2025 pada Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah adalah sebesar Rp14.168.703.034,00,- (Empat belas milyar serratus enam puluh delapan juta tujuh ratus tiga ribu tiga puluh empat rupiah) dan anggaran diindikatif perkiraan maju Tahun Anggaran 2026 adalah sebesar Rp14.237.316.623,00,- (Empat belas milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus enam belas ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah). Adapun rincian anggaran per program Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5
Usulan Anggaran Program pada Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah

No	Kelompok Unit Kerja	Pagu Hasil Input Rancangan Akhir Renja Perubahan TA 2025	Persentase
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	13.279.004.500,00	35,40
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	1.714.723.500,00	5,98
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	175.391.500,00	1,39
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	266.822.000,00	2,27
7.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	259.815.000,00	1,57
7.01.XX	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.760.592.447,00	53,35
Total		23.456.348.947,00	100,00

Berdasarkan tabel diatas program dengan anggaran terbesar adalah Program Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Rp. 13.279.004.500,00,00,- (Tiga belas milyar dua ratus tujuh puluh sembilan juta empat ribu lima ratus rupiah) atau 35.40% dari total pagu hasil input Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2025. sub kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum dengan total anggaran sebesar Rp

13.243.000.000,00,- (Tiga belas milyar dua ratus empat puluh tiga juta rupiah) atau 34.95% dari total pagu hasil input Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2025. atau 34.95% dari total pagu hasil input Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2025.

2.4.4 Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah

Sehubungan dengan surat undangan rapat Koordinasi Rancangan

Akhir Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025, sehubungan dengan surat undangan rapat koordinasi Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025 nomor: B/000.7.6.3/320/IV/Bappeda/2024. Hasil dari rapat koordinasi tersebut adalah Penyampaian Pagu Indikatif Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025, bahwa Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang mendapatkan anggaran pagu indikatif sebesar Rp. 23.456.348.947,00- (Dua puluh tiga milyar empat ratus lima puluh enam juta tiga ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah) dengan rincian jenis belanja sebagai berikut :

Tabel 2.6
Pagu Indikatif Rancangan Akhir Rencana Kerja
Perubahan Tahun Anggaran 2025

No	Jenis Belanja	Pagu Anggaran TA 2025
1	Belanja Pegawai	Rp. 5.579.815.529,00,-
2	Belanja Barang/Jasa dan Modal	Rp.18.378.305.806,00,-
	Total	Rp. 23.958.121.335,00,-

Pagu indikatif Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan Tahun Anggaran 2025 tersebut diinput dalam aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Modul Perencanaan (SIPD-RI), sesuai dengan instruksi Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang.

Total anggaran Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang berdasarkan hasil input Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp14.523.760.970,00,- (Empat belas milyar lima ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah) dengan rincian hasil input sebagai berikut :

Tabel 2.6
Hasil input Rancangan Akhir Rencana Kerja
Perubahan Tahun Anggaran 2025

No	Jenis Belanja	Pagu Anggaran TA 2025
1	Belanja Pegawai	Rp. 5.579.815.529,00,-
2	Belanja Barang/Jasa dan Modal	Rp.18.378.305.806,00,-
	Total	Rp. 23.958.121.335,00,-

Hasil input anggaran tersebut menjadi dasar Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2025 yang akan dijelaskan secara rinci pada Bab IV.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan Program / Kegiatan yang dibahas didalam musrenbang mekanimesnya diawali dari penggalian gagasan dari tingkat Desa melibatkan unsur Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Unsur Perempuan dan Orginasasi Kemasyarakatan sehingga menghasilkan usulan program yang di bawa ke forum Musrenbangdes. Melalui forum Musrenbangdes, skala prioritas usulan tingkat Desa/Kelurahan selanjutnya ditunjuk perwakilan dari Desa / Kelurahan untuk mengawal usulan tersebut di Forum Musrenbang Tingkat Kecamatan. Hasil Musrenbang Kecamatan merupakan Skala prioritas

program yang telah sesuai dengan kebutuhan riel masyarakat sesrta isu – isu penting dari masing – masing Perangkat Daerah yang ada pada Unit Pelaksana Teknis di tingkat Kecamatan.

Tabel 2.5 (TC.32)
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2025 KECAMATAN SEPATAN TIMUR KABUPATEN TANGERANG

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran /Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya	Desa Jatimulya	memberikan kenyamanan pada siswa untuk melaksanakan upacara dan olah raga	400m2	
2	Meningkatkan pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya	RT 002/002 dan RT 004/002 Desa Kampung Kelor	memberikan tempat belajar yanglayak bagi siswa karena saat ini terdapat kekurangan ruang kelas	3 lokal	
3	Meningkatkan pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya	Desa lebakwangi	meningkatkan pelayanan kepadamasyarakat	600m2	
4	Meningkatkan pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya	Desa jatimulya	meningkatkan pelayanan kepadamasyarakat	3 gedung	
5	Meningkatkan pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya	Jatimulya rt 03/rw 02	tersedianya lahan untuk pembangunan SMPN 4 karena banyaknya jumlah anak sekolah di	2ha	
6	Meningkatkan pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya	Kecamatan Sepatan Timur	meningkatkan akses pendidikan	P=500m L=4m	
7	Meningkatkan pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya	Kecamatan Sepatan Timur	memberikan kenyamanan pada siswa untuk melaksanakan upacara dan olah raga	300m	

8	Meningkatkan pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya	Jl. R Suprapto Kampung Sangiang Kecil Desa Sangiang	memberikan tempat belajar yanglayak bagi siswa karena saat ini terdapat kekurangan ruang kelas	3 lokal	
9	Meningkatkan pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya	Jl. Gaga Kecil RT01/ GempolSari	memberikan tempat belajar yanglayak bagi siswa karena saat ini terdapat kekurangan ruang kelas	4 lokal	
10	Meningkatkan pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya	Desa Kedaung Barat RT 001/002	memberikan tempat belajar yanglayak bagi siswa karena saat ini terdapat kekurangan ruang kelas	4 lokal	
11	Meningkatkan pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya	Desa Jatimulya	memberikan tempat belajar yanglayak bagi siswa karena saat ini terdapat kekurangan ruang kelas	4 lokal	
12	Meningkatkan pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya	Jl. Raya Gatot Soebroto No.48,Tanah Merah	perbaikan pagar yang rapuh agarbelajar mengajar siswa tidak terganggu	200m	
13	Meningkatkan pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya	RT 001/002 Desa Kedaung Barat	memberikan tempat belajar yanglayak bagi siswa karena saat ini terdapat kekurangan ruang kelas	P=100m, l= 3m	
14	Meningkatkan pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya	RT 001/002 Desa Kedaung Barat	memberikan sarana pendidikan yang layak bagi siswa karena saat ini terdapat kekurangan ruang kelas	4m x 5m	
15	Meningkatkan pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya	Desa Pondok kelor	memberikan tempat belajar yanglayak bagi siswa karena saat ini terdapat kekurangan ruang kelas	3 lokal	

16	Meningkatkan pembangunan SDM yangberkualitas dan berdaya	Desa sangiang	memberikan sarana pendidikanyang layak bagi siswa	100 m	
17	Meningkatkan pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya	Desa Jatimulya	memberikan sarana pendidikanyang layak bagi siswa	150 m	
18	Meningkatkan perekonomian masyarakat yang berdaya saing	RT 002/002 dan RT 004/002 Desa Kampung Kelor	meminimalisir terjadinya banjir sehingga aktifitas ekonomi wargatidak terganggu	200m	
19	Meningkatkan perekonomian masyarakat yang berdaya saing	Desa lebakwangi	meningkatnya ketrampilan warga sehingga dapat menekan pengangguran	150 orang	
20	Meningkatkan perekonomian masyarakat yang berdaya saing	Desa jatimulya	meningkatnya ketrampilan warga sehingga dapat menekan pengangguran	150 orang	
21	Meningkatkan perekonomian masyarakat yang berdaya saing	Jatimulya rt 03/rw 02	menghindari kelongsoran tanahsehingga aktifitas ekonomi masyarakat dapat tetap berjalan	P= 100m	

22	Meningkatkan perekonomian masyarakat yang berdaya saing	Desa sangiang	mengingkatkan perekonomianmasyarakat	50 ekor	
23	Meningkatkan perekonomian masyarakat yang berdaya saing	Desa sangiang	meningkatnya ketrampilan warga sehingga dapat menekan pengangguran	100 orang	
24	Meningkatkan perekonomian masyarakat yang berdaya saing	lokasi makam pahlawan desatanah merah	memberikan kemudahan akses fasilitas umum bagi masyarakat	P =96m, L=4m	
25	Meningkatkan perekonomian masyarakat yang berdaya saing	desa tanah merah	meningkatnya ketrampilan wargasehingga dapat menekan pengangguran	150 orang	
26	Meningkatkan perekonomian masyarakat yang berdaya saing	sisi jalan utama desa gempolsari	meminimalisir terjadinya banjir sehingga aktifitas ekonomi wargatidak terganggu	P=200m, L=1m	
27	Meningkatkan perekonomian masyarakat yang berdaya saing	batas desa gempolsari dan pondok kelor	meminimalisir terjadinya banjir sehingga aktifitas ekonomi wargatidak terganggu	p=400m, l= 1m	
28	Meningkatkan perekonomian masyarakat yang berdaya saing	Kp rajeg – kp pulo RT 03/04 Desa Kedaung Barat	memberikan kemudahan aksesjalan raya bagi warga	P=250m, l=3m	
29	Meningkatkan perekonomian masyarakat yang berdaya saing	utan jati RT 004/003 Desa Keda	memberikan kemudahan aksesjalan raya bagi warga	P=400m , L=1m	
30	Meningkatkan perekonomian masyarakat yang berdaya saing	Desa Pondok kelor	meningkatnya ketrampilan warga sehingga dapat menekan pengangguran	150 orang	

31	Meningkatkan perekonomian masyarakat yang berdaya saing	Sore Kedaung Barat – Kp. Bayur	memberikan kemudahan aksesjalan raya bagi warga	P=500m L=1m	
32	Meningkatkan perekonomian masyarakat yang berdaya saing	Desa Pondok kelor	Tersedianya pengembangan usaha UMKM	10 orang	
33	Meningkatkan perekonomian masyarakat yang berdaya saing	Desa Kampung Kelor	meningkatnya ketrampilan warga sehingga dapat menekan pengangguran	150 orang	
34	Meningkatkan perekonomian masyarakat yang berdaya saing	Desa Kampung Kelor	Tersedianya pengembangan usaha UMKM	1 Paket	
35	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang terpadu	rt 009/002 desa kampung kelor & Desa Pondok Kelor	menghubungkan warga antar desa	P =6m, l=4m	
36	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang terpadu	Desa lebakwangi RT 004/004	meningkatkan pelayanan dankemudahan jalan raya bagi masyarakat	P=150m, L= 2m	
37	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang terpadu	Lebakwangi RT 011/002	menjaga kebersihan lingkungan danmenghindari banjir	P=150m, L= 0.4m	
38	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang terpadu	Jatimulya rt 03/ rw 04	menjaga kebersihan lingkungan danmenghindari banjir	200m	
39	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang terpadu	rt 001/002 kp sangiang desa sangiang	menghindari pelanggaran bataslahan makam	300m’	
40	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang terpadu	Samping kantor desa sangiang	menjaga kebersihan lingkungan danmenghindari banjir	100m	

41	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang terpadu	jl Gatot Subroto desa tanahmerah	menjaga kebersihan lingkungan danmenghindari banjir	500m	
42	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang terpadu	Kp. Damprit Rt 01/03 Desakedaung barat	memberikan kemudahan aksessaluran drainase bagi warga	P=150m l = 40c	
43	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang terpadu	SDN Kampung Bayur Desa LebakWangi	memberikan kemudahan akses salurandrainase bagi warga	P=150m l = 40c	
44	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang terpadu	Kampung Primatani Desa GempolSari	memberikan kemudahan akses salurandrainase bagi warga	100m	
45	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang terpadu	Kampung Dato Rt.04/03 Desa Gempol Sari	meningkatkan kualitas akses Jalan	150m x 2m	
46	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang terpadu	Stadion mini Sepatan Timur	meningkatkan sarana dan prasaranaolahraga	1 Paket	
47	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang terpadu	GOR Kec. Sepatan Timur	meningkatkan sarana dan prasaranaolahraga	1 Paket	
48	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang terpadu	Kecamatan Sepatan Timur	meningkatkan sarana dan prasarana ruang terbuka hijau	1 Paket	
49	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang terpadu	Kecamatan Sepatan Timur	meningkatkan sarana dan prasarana rumahtidak layak huni	10 Rumah	
50	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang terpadu	Kecamatan Sepatan Timur	meningkatkan Pelayanan pada Masyarakat	200m	

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Tahun 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan RPJPN (Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Nasional) Tahun 2025-2045 yang merupakan momentum penting dalam menentukan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan dan berorientasi pada pencapaian Visi Indonesia Emas 2045 (Restuardy Daud, Dirjen Bina Pembangunan Daerah, Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia). Dalam Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekbang) Tahun 2024 yang diselenggarakan pada tanggal 26 Februari 2024 di Surabaya Dirjen Bina Pembangunan Daerah menyampaikan enam arahan Menteri Dalam Negeri yang meliputi :

a. Perencanaan yang berintegritas dan memuliakan efisensi;
b. Pembangunan Berorientasi Hasil;
c. Tingkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk kemandirian fiskal;
d. Mewujudkan pemerintahan yang Ramah Investasi;
e. Pendidikan dan Kesehatan Jalan Menuju Kesejahteraan;
f. Pelayanan Publiik untuk Mewujudkan Keadilan.

Arahan tersebut diharapkan dapat menjadi pedoman bagi para pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan dan program pembangunan yang berdampak positif dan berkelanjutan bagi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyrakat.

Selain melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan, Camat juga melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh pemerintahan di atasnya untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek Perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan, kewenangan lain yang dilimpahkan. Pelimpahan sebagian wewenang ini dilakukan berdasarkan kriteria eksternalitas dan efisiensi. Eksternalitas yang dimaksud adalah adalah kriteria pelimpahan urusan pemerintahan dengan memperhatikan dampak yang timbul sebagai akibat dari penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Apabila dampak yang ditimbulkan

bersifat internal kecamatan, maka urusan pemerintahan tersebut menjadi kewenangan camat. Sedangkan yang dimaksud dengan efisiensi adalah kriteria pelimpahan urusan pemerintahan dengan memperhatikan daya guna tertinggi yang dapat diperoleh dari penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan dilingkup kecamatan. Apabila urusan pemerintahan lebih berdayaguna ditangani oleh kecamatan, maka urusan tersebut menjadi kewenangan Camat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 226 ayat 1 bahwa Camat mendapatkan sebagian kewenangan bupati/wali kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota. Berikut kutipan pelimpahan wewenagan Bupati Tangerang Kepada Camat di Kabupaten Tangerang untuk menanganni sebagian urusan daerah berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Untuk

Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.

Tabel 3.1

Pelimpahan Wewenang Bupati Kepada Camat

Urusan daerah	Bidang urusan	Rincian urusan yang dilimpahkan
1. Penetapan	Pengesahan, Pengalihan tugas, Izin cuti.	1. Penetapan pengesahan anggota badan permusyawaratan desa (bpd) berdasarkan laporan dan berita acara pembentukan badan permusyawaratan desa (bpd); 2. Penetapan pengalihan tugas staf kelurahan dalam 1 (satu) kecamatan (diluar jabatan struktural dan fungsional); 3. Penetapan izin cuti pegawai; 4. Penetapan izin cuti kepala desa dan perangkat desa; dan 5. Penetapan pelaksana tugas kepala desa.

2. Penyelenggaraan	keciptakaryaan	1. Pemeliharaan pagar kantor milik kecamatan dan kelurahan; 2. Pemeliharaan gapura kantor milik kecamatan dan kelurahan; 3. Pemeliharaan taman dengan ukuran kurang dari 500m2 (lima ratus meter persegi); 4. Pemeliharaan paving blok jalan lingkungan penghubung antardesa/kelurahan; 5. Pemeliharaan ruang kantor milik kecamatan dan kelurahan; 6. Rehabilitasi ringan dan sedang aula kantor kecamatan dan kelurahan; 7. Penataan ruang kerja kantor kecamatan dan kelurahan; 8. Pemeliharaan dan rehabilitasi jalan lingkungan pada perumahan tertata yang telah diserahkan kepada pemerintah daerah; 9. Pembuatan tempat pembuangan sampah sementara dan sarana kebersihan; 10. Pemeliharaan saluran pembuangan akhir (drainase dan air limbah) skala kecamatan; 11. Pemeliharaan sarana penunjang kantor kecamatan dan kelurahan; 12. Pemeliharaan sarana air bersih dan sanitasi; 13. Pemeliharaan gelanggang olahraga dan stadion mini di kecamatan; 14. Pemeliharaan gedung bersama keagamaan kecamatan; 15. Bedah rumah perorangan bagi masyarakat berpenghasilan rendah khusus; dan

		16. Perbaikan/rehabilitasi rumah perorangan bagi masyarakat miskin yang terkena bencana alam.
	kebinamargaan dan sumber daya air	1. Pemeliharaan badan jalanpenghubung antardesa/kelurahan yang fungsinya lokal sekunder dan lingkungan; 2. Pemeliharaan jembatan perbatasan antardesa/kelurahan, dengan bentang jembatan paling tinggi 3 (tiga) meter; 3. Pemeliharaan drainase pada jalan penghubung antardesa/kelurahan yang fungsinya lokal sekunder dan lingkungan; 4. Pemeliharaan wilayah milik jalan pada jalan penghubung antardesa/kelurahan, meliputi pembersihan rumput/pengangkatan

		lumpur, yang fungsinya lokal sekunder dan lingkungan; 5. Pemeliharaan drainase pada lokasi jalan penghubung antardesa/kelurahan, meliputi pembersihan rumput/pengangkatan lumpur, yang fungsinya lokal sekunder dan lingkungan; 6. Pemeliharaan badan jembatan perbatasan antardesa/kelurahan dengan bentang paling tinggi 3 (tiga) meter serta bangunan pelengkap lainnya pada jalan desa/kelurahan yang fungsinya lokal sekunder dan lingkungan; 7. Pemeliharaan irigasi dan saluran tersier penghubung antardesa/kelurahan dengan lebar dan tinggi saluran paling tinggi 2 (dua) meter di luar saluran induk dan saluran sekunder; 8. Penyelenggaraan survey jalan penghubung antardesa/kelurahan yang fungsinya lokal sekunder dan lingkungan; 9. Monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan jalan/jembatan/irigasi di wilayah kecamatan; 10. Pembinaan/supervisi terhadap pelaksanaan manajemen pembangunan jalan/jembatan/irigasi kewenangan desa; 11. Pemeliharaanturap pada jalan penghubung antardesa/kelurahan yang fungsinya lokal sekunder dan lingkungan; dan

		12. Pemeliharaan sarana dan prasarana pada perumahan tertata yang telah diserahkan kepada pemerintah daerah
	kependudukan dan catatan sipil	1. Pendataan dan pelaporan data penduduk dan pendatang; 2. Pelaporan pembuatan kartu tanda penduduk dan kartu keluarga dari desa/kelurahan; 3. Pelaksanaan input data kartu tanda penduduk dan kartu keluarga; 4. Pengolahan data dan dan informasi kependudukan di kecamatan; dan 5. Pembinaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil kepada desa/kelurahan.
	operasional pengangkutan sampah	1. Pengelolaan sampah rumah tangga berbasis 3r (reduce, recycle, dan reduce) pada tingkat kecamatan; 2. Pembentukan bank sampah pada tingkat kecamatan; 3. Penyelenggaraan fasilitasi kegiatan biopori pada tingkat kecamatan; 4. Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan tempat pengelolaan sampah terpadu pada tingkat kecamatan; 5. Pengangkutan sampah dari tempat pembuangan sampah sementara sampai tiba pada tempat pembuangan akhir untuk wilayah perumahan/permukiman di luar kawasan tertata; 6. Pengangkutan sampah dari tempat pembuangan sampah sementara sampai tiba di tempat pembuangan sampah akhir untuk wilayah sekitar

		jalan desa/kelurahan; 7. Pengangkutan sampah dari tempat pembuangan sampah sementara sampai tiba di tempat pembuangan akhir jatiwaringin untuk wilayah perkantoran kecamatan, desa, dan kelurahan; 8. Kerja bakti/gotong-royong pembersihan sampah pada tingkat kecamatan; 9. Pemeliharaan taman kota pada kecamatan secara swakelola; 10. Penyelenggaraan lomba kebersihan pada tingkat kecamatan; 11. Pengelolaan kegiatan kurangi sampah di sekitar kantor (kurasakan) pada tingkat kecamatan; 12. Pengelolaan kegiatan kita peduli sampah (kiprah) pada tingkat kecamatan; dan 13. Pengadaan sarana kebersihan, yang meliputi: a) kendaraan gerobak motor; b) gerobak sampah; c) tong sampah; d) mesin potong rumput; e) gergaji mesin pemotong rumput; mesin pompa; dan f) sarana kebersihan lainnya.
	Bidang kesehatan	1. Penyelenggaraan desa/kelurahan siaga pada tingkat kecamatan; 2. Penyelenggaraan kabupaten tangerang sehat (kts) tingkat kecamatan; dan 3. Penyelenggaraan gerakan saying ibu pada tingkat kecamatan.
	ketenagakerajaan	1. Penyelenggaraan padat karya; dan

		2. Pelatihan keterampilan bagi masyarakat usia produktif.
	pemberdayaan masyarakat dan desa	1. Penyelenggaraan perlombaan desa/kelurahan tingkat kecamatan; 2. Penyelenggaraan program peningkatan wanita menuju keluarga sehat sejahtera pada tingkat kecamatan; 3. Penyelenggaraan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pada tingkat kecamatan; 4. Penyelenggaraan pelantikan anggota badan permusyawaratan desa; 5. Penyelenggaraan pelanjtikan penjabat kepala desa; 6. Penyelenggaraan evaluasi rancangan peraturan desa tentang apb desa; 7. Penyelenggaraan evaluasi rancangan peraturan desa tentang struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa; 8. Penyelenggaraan evaluasi laporan penyelenggaraan pemerintah desa; dan 9. Penyelenggaraan evaluasi laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhir masa jabatan kepala desa.
	Pembinaan dan pengelolaan generasi muda, olahraga, seni budaya, dan kegiatan	1. Penyelenggaraan pembinaan dan pengelolaan generasi muda, yang meliputi: a) paskibra; b) knpi; c) karang taruna; dan

	keagamaan di kecamatan	d) pramuka. 2. Penyelenggaraan pembinaan olahraga melalui penyelenggaraan kegiatan olahraga kecamatan; 3. Penyelenggaraan pembinaan seni budaya dan pariwisata, yang meliputi: b) pentas seni budaya lokal; dan c) kelompok sadar wisata (pokdarwis). 4. Penyelenggaraan pembinaan keagamaan melalui penyelengaraan musabaqah tilawatil quran tingkat kecamatan dan kabupaten;
	urusan bencana daerah	1. Pengadaan persediaan sembako; dan 2. Pengadaan sarana penanggulangan pra dan pasca banjir.
	urusan perpustakaan daerah	1. Pembentukan perpustakaan daerah; 2. Pengadaan buku; 3. Pengadaan sarana perpustakaan; dan 4. Pengelolaan perpustakaan kecamatan.
Pemungutan	Memungut retribusi izin mendirikan bangunan (imb):	1. Rumah tinggal perorangan di pemukiman luar kawasan perumahan; 2. Penambahan/rehabilitasi rumah tinggal perorangan di pemukiman luar kawasan perumahan dan kawasan perumahan; dan/atau 3. Toko dan ruko satu pintu diluar kawasan tertata;

Selain tugas yang diperoleh dari pelimpahan sebagian wewenang Bupati atau Walikota untuk menangan sebagian urusan otonomi daerah, Camat juga menyelenggarakan tugas-tugas umum pemerintahan yang meliputi :

a. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
b. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang- undangan;
d. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
e. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan

ditingkat kecamatan;

f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan, dan;
g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa/kelurahan

Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Sepatan Timur Tahun 2025

Tujuan dan sasaran perangkat daerah merupakan proses, cara, dan hasil penerjamahan atas Visi dan Misi Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026, melalui Visi ***"Kabupaten Tangerang Berdaya Saing Menuju Masyarakat Madani"***. Adapun misi yang berkaitan dengan urusan pemerintahan (kecamatan) adalah misi ke-5 "Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, demokratis, dan partisipatif".

Rumusan tujuan merupakan proses penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) – tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Kerja Perubahan didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama bidang urusan di Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang.

Tabel 3.2
Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja
Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang Tahun 2025

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Target Capaian 2024
1	**Meningkatkan kualitas pelayanan publik kecamatan**		Indeks Kepuasan Masyarakat	82,25
		Meningkatnya pelayanan publik sesuai dengan standar kecamatan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	82,25
		Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja	Nilai AKIP	74.15

Sebagaimana Tujuan dan Sasaran Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang serta isu-isu penting yang perlu diselesaikan pada tahun 2025, maka sebagai acuan penyusunan dokumen perencanaan tahunana diperlukan penetapan prioritas urusan Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2025 yang tercantum pada Lampiran 3.

3.2 Program dan Kegiatan

Mengacu pada Visi dan Misi Rencana Pembangunana Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 Kabupaten Tangerang, serta tujuan, sasaran dan strategi yang mendukung tercapainya Visi dan Misi tersebut, maka program dan kegiatan pada Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan:
   1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
   2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
   3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
   4) Administrasi Umum Perangkat Daerah;
   5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
   6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, dengan kegiatan:
   1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan;
   2) Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum;
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, dengan kegiatan:
   1) Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa;
   2) Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan;
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, dengan kegiatan:
   1) Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, dengan kegiatan:
   1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah;
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, dengan kegiatan:
   1) Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Program, kegiatan, dan sub kegiatan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2025 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026 yang nomenklaturnya mengacu pada nomenklatur yang terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Daerah, dan dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Tabel 3.3
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7		8	9
7	Unsur Kewilayahan								
7.01	Kecamatan								
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	Kecamatan Sepatan Timur	100%	7.676.909.720	APBD		100%	8.152.947.953

7.01.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Sepatan Timur	3	209.483.750	APBD		3	238.048.700
7.01.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan	Kecamatan Sepatan Timur	1	5.102.589.970	APBD		1	5.209.061.091
7.01.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan Pembinaan Pegawai	Kecamatan Sepatan Timur	1	102.309.500	APBD		1	76.315.000
7.01.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Sepatan Timur	1	529.147.100	APBD		1	751.181.112
7.01.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Jasa Penunjang	Kecamatan Sepatan Timur	14	1.191.967.200	APBD		14	1.295.498.400

7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Sepatan Timur	4	541.412.200	APBD		4	582.843.650
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase laporan trantibum yang di tindaklanjuti	Kecamatan Sepatan Timur	100%	206.819.500	APBD		100%	214.189.500
7.01.04.2.01	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan gangguan trantibum	Kecamatan Sepatan Timur	4	206.819.500	APBD		4	214.189.500
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa dengan laporan keuangan dan administrasi baik	Kecamatan Sepatan Timur	100%	247.075.000	APBD		100%	240.748.200

7.01.062.01	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa dengan laporan keuangan dan administrasi baik	Kecamatan Sepatan Timur	8	247.075.000			8	240.748.200
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	Kecamatan Sepatan Timur	100%	1.303.845.250	APBD		100%	1.407.532.715
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	Kecamatan Sepatan Timur	10	1.303.845.250	APBD		10	1.407.532.715
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar	Kecamatan Sepatan Timur	100%	37.604.500	APBD		100%	39.872.000

		Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara	Kecamatan Sepatan Timur		4.768.000.000	APBD			4.600.000.000
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Pemenuhan sarana dan prasarana Paten di Kecamatan	Kecamatan Sepatan Timur	1	37.604.500	APBD		1	39.872.000
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah infrastruktur yang dipelihara	Kecamatan Sepatan Timur	40	4.768.000.000	APBD		45	4.600.000.000
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Prosentase Program Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum	Kecamatan Sepatan Timur	100%	283.507.000,00	APBD		100%	322.470.602

7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti pembinaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Sepatan Timur	3	283.507.000,00	APBD		3	322.470.602

BAB IV
RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN
KECAMATAN SEPATAN TIMUR TAHUN 2025

Rencana Kerja Kecamatan Sepatan Timur Tahun 2025 ini juga menjabarkan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra setiap tahunnya dan sebagai bahan evaluasi dari capaian program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan di tahun yang lalu, sebagai panduan kinerja bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun berjalan dan perencanaan bagi program dan kegiatan yang akan datang.

Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang pada Tahun 2025 melaksanakan 6 (Enam) Program Utama, 14 Kegiatan, dan 34 Sub Kegiatan yang tercantum dalam program kinerja nomenklaturnya mengacu pada nomenklatur yang terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Daerah, dan dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi , Validasi Dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenlatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, dibawah ini merupakan rekapitulasi program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta anggaran, yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
3. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
4. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
5. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
6. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Keenam program yang tercantum dalam progran kinerja akan dianalisis sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan, anggaran Rp 8.509.038.235,00,-
   Indikator Program : Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan

   dengan target 100%;
2. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum, dengan anggaran Rp. 141.965.250,00,-
   Indikator Program : Persentase laporan trantibum yang di fasilitasi dengan target 100%;
3. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa, dengan anggaran Rp. 203.478.000,00,-
   Indikator Program : Persentase desa dengan laporan keuangan dan administrasi baik dengan target 84,50%;
4. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan, dengan anggaran Rp. 1.543.433.400,00,-
   Indikator Program : Persentase kelompok masyarakat yan mendapat pembinaan/pemberdayaan, dengan target 92%;
5. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik, dengan anggaran Rp. 13.340.026.700,00
   Indikator Program : Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara dengan target 89,50%, dan Persentase pemenuhan PATEN

sesuai dengan standar dengan target 89,50%;

6. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, dengan anggaran Rp. 220.179.750,00,-

Tabel 4.1
Rekapitulasi Anggaran Rencana Kerja Perubahan Tahun Anggaran 2025 dan Perkiraan Maju Tahun Anggaran 2026

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran			
				2025		2026	
				Target	Rp	Target	Rp
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
		Nilai AKIP KECAMATAN SEPATAN TIMUR	**Nilai**	**74.15 (BB)**		**75.45 (BB)**	
7.1.1.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan**	**Persen**	**100%**	**8.509.038.235,00**	**100%**	**8.152.947.953,00**

7.1.1.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	3	152.509.500,00	3	238.048.700,00
		Hasil : Persentase Ketersediaan Dokumen perencanaan dan Pelaporan	Persen	100%		100%	
7.1.1.01.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4	61.323.750,00	4	86.678.700,00

7.1.1.01.2.01.06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	39.534.500,00	2	78.250.000,00
7.1.1.01.2.01.07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	51.651.250,00	1	73.120.000,00
7.1.1.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Keluaran : Jumlah Dokumen Admistrasi keuangan	Dokumen	1	5.628.575.379,00	1	5.209.061.091,00
		Hasil : Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100%		100%	

7.1.1.01.2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	25	5.579.815.529,00	25	5.133.760.971,00
7.1.1.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Laporan	2	48.759.850,00	2	75.300.120,00
7.1.1.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Keluaran : Jumlah dokumen Pembinaan Pegawai	Dokumen	1	59.487.600,00	1	76.315.000,00
		Hasil : Prosentase aparatur yang meningkat kapasitasnya	Persen	100%		100%	

7.1.1.01.2.05.09	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	30	59.487.600,00	45	76.315.000,00
7.1.1.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Keluaran : Jumlah dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen	1	722.721.600,00	1	751.181.112,00
		Hasil : Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100%		100%	
7.01.01.2.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	13.762.500,00	4	26.805.500,00

7.01.01.2.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	35	540.497.800,00	35	460.125.000
7.01.01.2.06.03	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12	30.234.600,00	12	55.470.000,00
7.01.01.2.06.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	15	34.687.600,00	15	48.380.300,00
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	8	23.215.100,00	8	31.500.312,00
7.01.01.2.06.08	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	49.020.000,00	12	75.280.000,00

7.01.01.2.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	150	31.304.000,00	200	53.620.000,00
7.1.1.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Keluaran : Jumlah dokumen Jasa Penunjang	Dokumen	1	1.375.722.688,00	1	1.295.498.400,00
		Hasil : Persentase pemenuhan Jasa Penunjang	Persen	100%		100%	
7.1.1.01.2.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jenis	12	176.301.120,00	12	179.370.400,00
7.1.1.01.2.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan/Orang	14	1.199.421.568,00	14	1.116.128.000,00

7.1.1.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Keluaran : Jumlah dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	1	570.021.468,00	1	582.843.650,00
		Hasil : Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persen	100%		100%	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	2	70.300.484,00	2	80.612.930,00

7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	4	135.620.984,00	4	113.730.600,00
7.1.1.01.2.09.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	25	24.100.000,00	25	28.500.120,00
7.1.1.01.2.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	340.000.000,00	2	360.000.000,00
		Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	**Nilai**	**82,25**		**83,25**	

7.1.4.01	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase laporan trantibum yang di fasilitasi**	**Persen**	**100%**	**141.965.250,00**	**100%**	**214.189.500,00**
7.1.4.01.2.09	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Keluaran : Jumlah kegiatan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	Jenis	1	141.965.250,00	1	206.819.500,00
		Hasil : Persentase laporan trantibum yang di fasilitasi	Persen	100%		100%	
7.1.4.01.2.09.01	Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	4	141.965.250,00	4	206.819.500,00

7.1.6.01	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase desa dengan laporan keuangan dan administrasi baik**	**Persen**	**100%**	**203.478.000,00**	**100%**	**240.748.200,00**
7.1.6.01.2.09	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Keluaran : Jumlah desa dengan laporan keuangan dan administrasi baik	Desa	8	203.478.000,00	100%	240.748.200,00
		Hasil : Persentase desa dengan laporan keuangan dan administrasi baik	Persen	85,89 %		85,89%	
7.1.6.01.2.09.01	Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	4	101.182.500,00	4	125.108.300,00

7.1.6.01.2.09.02	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Dokumen	2	61.743.000,00	2	63.250.700,00
7.1.6.01.2.09.03	Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	2	40.552.500,00	2	52.389.200,00
7.1.3.01	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan**	**Persen**	**100%**	**1.543.433.400,00**	**100%**	**1.407.532.715,00**
7.1.6.01.2.09	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Keluaran : Jumlah kelompok masyarakat yang	Kelompok	18	1.543.433.400,00	100%	1.407.532.715,00

		mendapat pembinaan/pemberdayaan					
		Hasil : Persentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	Persen	92%		92%	
7.01.03.2.01.01	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	1.464.771.400,00	12	1.335.704.415,00

7.01.03.2.01.03	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga Kemasyarakatan	5	78.662.000,00	10	71.828.300,00
7.1.6.01	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar**	**Persen**	**100%**	**13.340.026.700,00**	**100%**	**13..600.000.000,00**
		Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara	**Persen**				

7.1.6.01.2.09	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Keluaran : Pemenuhan sarana dan prasarana Paten di Kecamatan	Jenis	2	27.026.700,00	2	39.872.000,00
		Hasil : Persentase terpenuhinya paten sesuai dengan standart	Persen	100%		100%	
7.1.6.01.2.09.01	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	4	27.026.700,00	2	39.872.000,00
7.1.6.01.2.09	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Keluaran : Jumlah infrastruktur yang dipelihara	Titik	40	13.313.000.000,00	40	13.460.000.000,00

		Hasil : Persentase infrastruktur dasar yang terpelihara	Persen	100%		100%	
7.1.6.01.2.09.01	Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah dokumen koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum	Dokumen	1	13.313.000.000,00	40	13.460.000.000,00
7.1.6.01	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Prosentase Program Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum**	**Persen**	**100%**	**283.507.000**	**100%**	**322.470.602**

7.1.6.01.2.09	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Keluaran : Jumlah Orang yang mengikuti pembinaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jenis	3	283.507.000	3	322.470.602
		Hasil : Persentase Orang yang mengikuti pembinaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persen	100%		100%	
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan	Orang	50	201.577.000	50	220.870.600

	Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia					

7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	4	81.930.000	4	101.600.002
Jumlah Total					**23.958.121.335,00**		**24.977.760.970,00**

Berdasarkan tabel diatas program dengan anggaran terbesar adalah Program Penyelenggaraan Pemerintahan Pelayanan Publik dengan anggaran sebesar Rp. 13.340.026.700,00,- (Tiga belas milyar tiga ratus empat puluh juta dua puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) atau 53.44% dari total anggaran Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2025.

BAB V
PENUTUP

Dokumen Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah (RKPD) Kecamatan Sepatan Timur Tahun 2025 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun dengan menjabarkan dokumen Renstra Kecamatan Sepatan Timur Tahun 2024-2026, dengan mempedomani RPD Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026. Seliain itu Rencana Kerja Perubahan merupakan pedoman rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan orientasi pada hasil yang ingin dicapai selama Tahun 2025.

Sebagai pedoman kerja, pelaksanaan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2025 ditetapkan dengan kaidah-kaidah sebagai berikut:

1. Seluruh aparatur Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang wajib melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Rencana Kerja Perubahan Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Anggaran pelaksanaan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang Tahun 2025 akan dijabarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025;

3. Pelaksanaan DPA Tahun 2025 akan dimonitoring setiap bulan dan dilaporkan kepada Camat Sepatan Timur setiap 3 (tiga) bulan. Pada akhir tahun pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Keccamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang Tahun 2025 akan dievaluasi sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2026.

55. Kecamatan Sindang Jaya

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana kerja merupakan merupakan rencana kerja tahunan yang menjabarkan pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan dalam Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA). Renja SKPD Kecamatan Sindang Jaya mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sebagai tolak ukur keberhasilan pembangunan dengan memperhatikan Program Unggulan Kabupaten Tangerang sebagai indikator keberhasilan dan evaluasi kebijakan pembangunan.

Dalam konteks pelaksanaan pembangunan Kecamatan Sindang Jaya dituntut untuk mampu melaksanakan tugas dan kewenangan yang telah diberikan Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan pembangunan yang ada di Kecamatan Sindang Jaya sesuai dengan aspirasi masyarakat. Ini semua demi kesejahteraan masyarakat Kecamatan Sidang Jaya.

Proses penyusunan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Sindang Jaya Kabupaten Tangerang berdasarkan kepada Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Sindang Jaya dengan tetap memperhatikan program prioritas, agar didalam pelaksanaan program/ kegiatan terwujud sinergitas antar dokumen perencanaan, sehingga dapat memenuhi indikator keberhasilan yang telah ditetapkan.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Sindang Jaya adalah :

1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286);
2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tamgbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 No. 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4437) ;
4. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 33 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Sindang Jaya Kabupaten Tangerang adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dalam mewujudkan efisiensi dalam pembangunan daerah.

Tujuannya adalah agar dokumen perencanaan yang disusun dapat dijadikan acuan oleh berbagai pihak yang akan melaksanakan kegiatan di Kecamatan Sindang Jaya sehingga terwujud sinergitas antar pemangku kewenangan yang ada di Kecamatan Sindang Jaya. Dan dapat dijadikan bahan evaluasi bagi Kabupaten dalam pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Sindang Jaya serta dapat dijadikan bahan evaluasi bagi camat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pada Tahun ini.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
2. Landasan Hukum
3. Maksud dan Tujuan
4. Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025
1 Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2025
2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Sindang Jaya
3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan
4 Review terhadap Rancangan RKPD Perubahan
5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN SINDANG JAYA

BAB IV. PENUTUP
1 Catatan Penting
2 Kaidah Pelaksanaan
3 Rencana Tindak Lanjut

BAB II
EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025

Proses penyusunan suatu perencanaan erat kaitannya dengan proses evaluasi, dari hasil evaluasi dapat teridentifikasi dua hal yaitu sejauh mana proses perencanaan pembangunan dilaksanakan oleh SKPD dan permasalahan- permasalahan yang menghambat pelaksanaan perencanaan pembangunan tersebut.

Hasil evaluasi tersebut sangat penting sebagai masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan pada tahun yang akan datang. Rencana Strategis Kecamatan Sindang Jaya Tahun 2024-2026 yang memuat indikator keberhasilan suatu proses perencanaan pembangunan untuk kurun waktu 3 (tiga) tahun, dijadikan tolak ukur untuk menilai sejauh mana perencanaan pembangunan telah dilaksanakan. Renstra tersebut merupakan panduan Kecamatan Sindang Jaya dalam melaksanakan program dan kegiatannya.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024, Kecamatan Sindang Jaya melaksanakan program dan kegiatan dengan dukungan anggaran bersumber dari APBD Kabupaten Tangerang, kemudian pada saat anggaran perubahan (APBD-P) tahun 2024 menjadi sebesar Rp.16.270.993.662,- (Enam Belas Milyard Dua Satur Tujuh Puluh Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Enam Puluh Dua Rupiah), dengan Realisasi Anggaran sebesar Rp.16.134.550.377,-(Enam Belas Milyard Seratus Tiga Puluh Empat Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh tujuh Rupiah) atau persentase realisasi sebesar 99.16 %

Adanya sisa anggaran tersebut dikarenakan adanya efisiensi dari berbagai kegiatan yang tidak semua terserap, antara lain pada sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, penyerapan anggaran pada sub kegiatan ini tidak mencapai 100% dikarenakan efisiensi anggaran yang disebabkan oleh proses penawaran pada saat pengadaan langsung dengan pihak ketiga. Selain itu, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, penyerapan anggaran pada sub kegiatan ini tidak tercapai 100% dikarenakan efisiensi anggaran yang disebabkan oleh pemenuhan barang cetakan dan penggandaan yang disesuaikan dengan kebutuhan.

Kemudian penyediaan gaji dan tunjangan ASN, kurang optimal penyerapan anggarannya yaitu pada belanja gaji pokok PNS, Belanja Tunjagan Keluarga PNS Belanja Tunjangan PPh, Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS, Belanja Jaminan Kematian PNS. Hal ini disebabkan karena adanya kekosongan jabatan esselon IV selama lebih dari 8 bulan di Kecamatan Sindang Jaya, serta terdapat staf yang memasuki usia pensiun. Sedangkan pada Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS juga kurang optimal penyerapannya hal ini dikarenakan terdapat staf yang berpindah jabatannya dari Fungional Umum menjadi Fungional Tertentu.

Selain itu, belanja yang tidak dilakukan penyerapan yaitu Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS, hal ini disebabkan belum ada kebijakan pencairan anggaran dari Pemerintah Daerah. Kecamatan Sindang Jaya Kabupaten Tangerang pada Tahun Anggaran 2025 memiliki Pagu Murni sebesar Rp.

20.017.117.416,- (Dua Puluh Miliyard Tujuh Belas Juta Seratus Tujuh Belas Ribu Empar Ratus Enam Belas Rupiah), dengan Realisasi Anggaran sampai dengan Triwulan II sebesar Rp 7.676.259.081,- (Tujuh Miliyard Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Delapan Puluh Satu Rupiah) atau persentase realisasi sebesar 39,47 % Diharapkan Realisasi Belanja tahun 2025 dapat tercapai dan dapat menyerap anggaran sesuai dana yang diberikan. Pada tahun 2025 sampai dengan Triwulan II secara keseluruhan program dan kegiatan serta sub kegiatan telah mencapai target dari Indikator Kinerja Utama Tahun 2025. Berikut akan disajikan Tabel Review Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Sindang Jaya tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra Kecamatan Sindang Jaya, yang bertujuan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra SKPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Review didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya dan perkiraan pelaksanaan DPA Kecamatan Sindang Jaya tahun berjalan (tahun 2025). Adapun gambaran selengkapnya tentang evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Sindang Jaya 2025 sampai dengan triwulan 2 disajikan sebagaimana tabel 1 (Tabel T- C.29) berikut :

Tabel 1 (T-C.29.)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 Kabupaten Tangerang

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Sindang Jaya

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan 2025 (Renja Perangkat Daerah tahun 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
UNSUR KEWILAYAHAN										
KECAMATAN										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan**	**PERSEN**	**100**	**100**	**100**	**100**	**1**	**100**	**25**	**0,25**
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DOKUMEN	11	11	11	11	1	11	2	0,18
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DOKUMEN	6	6	6	6	1	7	2	0
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	LAPORAN	4	4	4	4	1	4	1	0,25
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	LAPORAN	1	1	1	1	1	1	1	1
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan	LAPORAN	2	2	2	2	1	2	0	0
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	ORANG/BULAN	20	20	20	20	1	20	20	1
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan	LAPORAN	4	4	4	4	1	4	1	0,25

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan 2025 (Renja Perangkat Daerah tahun 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD									
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang difasilitasi	ORANG	20	20	20	20	1	20	0	0
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	ORANG	20	20	20	20	1	20	0	0
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	ORANG	20	20	20	20	1	20	0	0
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	DOKUMEN	8	8	8	8	1	8	2	0,25
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	PAKET	5	5	5	5	1	5	5	1
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	PAKET	15	15	15	15	1	15	4	0,27
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	PAKET	12	12	12	12	1	12	0	0
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	PAKET	18	18	18	18	1	18	18	1
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	PAKET	5	5	5	5	1	5	5	1
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	LAPORAN	2	2	2	2	1	2	2	1
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	LAPORAN	1080	1080	1080	1080	1	1080	270	0,25
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	LAPORAN	400	400	400	400	1	400	100	0,25

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan 2025 (Renja Perangkat Daerah tahun 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah	UNIT	2	2	2	2	1	2	0	0
Pengadaan Mebel	Tersedianya mebel	UNIT	2	2	2	2	1	2	0	0
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang	JENIS	23	23	23	23	1	2	2	0
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	LAPORAN	1	1	1	1	1	1	1	1
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	LAPORAN	7	7	7	7	1	7	7	1
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	LAPORAN	15	15	15	15	1	15	15	1
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	JENIS	28	28	28	28	1	28	7	0,25
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	UNIT	2	2	2	2	1	2	2	1
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	UNIT	4	4	4	4	1	4	4	1
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	UNIT	39	39	39	39	1	39	10	0,26
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	UNIT	7	7	7	7	1	7	4	0,57
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar**	**PERSEN**	**100**	**100**	**100**	**100**	**1**	**100**	**25**	**0,25**
	Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara	PERSEN	100	100	100	100	1	100	25	0,25

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan 2025 (Renja Perangkat Daerah tahun 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah laporan pelayanan	DOKUMEN	2	2	2	2	1	2	0	0
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	LAPORAN	2	2	2	2	1	2	0	0
Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah dokumen pemeliharaan	DOKUMEN	30	30	30	30	1	30	7	0,23
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	DOKUMEN	41	41	41	41	1	41	10	0,24
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Prosentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan**	**PERSEN**	**85**	**85**	**85**	**85**	**1**	**87**	**15**	**0**
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Pemberdayaan	DOKUMEN	5	5	5	5	1	5	1	0,2
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga kemasyarakatan yang Berpatisipasi dalam Forum Musyawarah perencanaan pembangunan Di Desa	LAPORAN	7	7	7	7	1	7	7	1
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	LEMBAGA	10	10	10	10	1	10	3	0,3
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti**	**PERSEN**	**100**	**100**	**100**	**100**	**1**	**100**	**25**	**0,25**

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan 2025 (Renja Perangkat Daerah tahun 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan gangguan trantibum	DOKUMEN	4	4	4	4	1	4	1	0,25
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	LAPORAN	4	4	4	4	1	4	1	0,25
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti**	**PERSEN**	**100**	**100**	**100**	**100**	**1**	**100**	**25**	**0,25**
	Persentase tertib administrasi pemerintahan desa	~~PERSEN~~	87					87	15	0,17
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah rekomendasi yang dikeluarkan	DOKUMEN	10	10	10	10	1	10	1	0,1
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	ORANG	50	50	50	50	1	50	0	0
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	DOKUMEN	1	1	1	1	1	1	0	0
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**Persentase pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa**	**PERSEN**	**100**	**100**	**100**	**100**	**1**	**100**	**25**	**0,25**

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan 2025 (Renja Perangkat Daerah tahun 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	LAPORAN	7	7	7	7	1	7	1	0,14
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	DOKUMEN	7	7	7	7	1	7	7	1
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	DOKUMEN	7	7	7	7	1	7	0	0

Berdasarkan tabel 1 (T-C.29.) di atas, dapat diketahui realisasi yang telah memenuhi target kinerja yaitu:

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah capaian kinerja tercapai semua kegiatan terserap dengan baik dan berjalan semua.
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, capaian kinerja tercapai semua kegiatan terserap dengan baik dan berjalan semua.
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, capaian kinerja tercapai semua kegiatan terserap dengan baik dan berjalan semua.
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, capaian kinerja tercapai semua kegiatan terserap dengan baik dan berjalan semua.
5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, capaian kinerja tercapai semua kegiatan terserap dengan baik dan berjalan semua.
6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, capaian kinerja tercapai semua kegiatan terserap dengan baik dan berjalan semua.
7. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan, capaian kinerja tercapai semua kegiatan terserap dengan baik dan berjalan semua.
8. Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum, capaian kinerja tercapai semua kegiatan terserap dengan baik dan berjalan semua.
9. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, capaian kinerja tercapai semua kegiatan terserap dengan baik dan berjalan semua.
10. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, capaian kinerja tercapai semua kegiatan terserap dengan baik dan berjalan semua.
11. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah, capaian kinerja tercapai semua kegiatan terserap dengan baik dan berjalan semua.
12. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Sub Kegiatan, capaian kinerja tercapai semua kegiatan terserap dengan baik dan berjalan semua.

Adapun evaluasi keuangan Kecamatan Sindang Jaya sampai dengan Triwulan ke II Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini Tabel 2 (Tabel E.81):

Tabel 2 (Tabel E.81)
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten Tangerang
Renja Perangkat Daerah Kecamatan Sindang Jaya Kabupaten Tangerang
Periode Pelaksanaan : Semester 1 Tahun 2025

Sasaran	Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024-2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									I		II								
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja																			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan**	**100**	**9.170.407.584**	**100**	**8.401.529.056**	**100**	**9.295.868.013**	**25**	**2.683.090.204**	**-**	**-**	**25**	**2.683.090.204**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Kec. Sindang Jaya**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11	274.604.000	11	220.718.700	11	193.422.875	2	68.011.500	-	-	2	68.011.500	-	-	-	-	Kec. Sindang Jaya
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7	83.973.000	6	75.478.000	7	83.973.000	2	15.835.000	-	-	2	15.835.000	-	-	-	-	Kec. Sindang Jaya
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	73.410.000	4	54.327.200	4	73.410.000	1	18.727.500	-	-	1	18.727.500	-	-	-	-	Kec. Sindang Jaya
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	117.221.000	1	90.913.500	1	36.039.875	1	33.449.000	-	-	1	33.449.000	-	-	-	-	Kec. Sindang Jaya
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan	2	4.435.238.788	2	3.953.766.376	2	4.586.192.802	0	1.129.040.374	-	-	0	1.129.040.374	-	-	-	-	Kec. Sindang Jaya
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20	4.408.290.848	20	3.925.318.436	20	4.559.244.862	20	1.121.928.389	-	-	20	1.121.928.389	-	-	-	-	Kec. Sindang Jaya

Sasaran	Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024-2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									I		II								
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4	26.947.940	4	28.447.940	4	26.947.940	1	7.111.985	-	-	1	7.111.985	-	-	-	-	Kec. Sindang Jaya
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang difasilitasi	20	214.489.800	20	195.676.500	20	176.481.600	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Kec. Sindang Jaya
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	20	86.906.200	20	76.550.000	20	48.898.000	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Kec. Sindang Jaya
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20	127.583.600	20	119.126.500	20	127.583.600	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Kec. Sindang Jaya
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	8	1.143.435.900	8	1.201.098.800	8	1.237.131.640	2	305.617.400	-	-	2	305.617.400	-	-	-	-	Kec. Sindang Jaya
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5	17.522.000	5	11.354.500	5	31.806.300	5	17.522.000	-	-	5	17.522.000	-	-	-	-	Kec. Sindang Jaya
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15	728.144.900	15	793.985.500	15	785.552.240	4	197.200.000	-	-	4	197.200.000	-	-	-	-	Kec. Sindang Jaya
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12	32.690.800	12	20.979.800	12	40.166.000	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Kec. Sindang Jaya
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	18	76.955.500	18	42.837.000	18	98.204.400	18	19.736.500	-	-	18	19.736.500	-	-	-	-	Kec. Sindang Jaya
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5	66.631.700	5	55.484.000	5	66.631.700	5	18.576.900	-	-	5	18.576.900	-	-	-	-	Kec. Sindang Jaya

Sasaran	Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024-2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									I		II								
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2	75.360.000	2	37.408.000	2	68.640.000	2	13.840.000	-	-	2	13.840.000	-	-	-	-	Kec. Sindang Jaya
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1080	81.081.000	1080	164.580.000	1080	81.081.000	270	27.027.000	-	-	270	27.027.000	-	-	-	-	Kec. Sindang Jaya
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	400	65.050.000	400	74.470.000	400	65.050.000	100	11.715.000	-	-	100	11.715.000	-	-	-	-	Kec. Sindang Jaya
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah	2	33.706.100	2	192.800.000	2	33.706.100	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Kec. Sindang Jaya
	Pengadaan Mebel	Tersedianya mebel	2	33.706.100	2	192.800.000	2	33.706.100	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Kec. Sindang Jaya
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang	2	1.297.948.224	23	1.250.073.708	2	1.297.948.224	2	331.817.967	-	-	2	331.817.967	-	-	-	-	Kec. Sindang Jaya
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	17.108.784	1	17.162.000	1	17.108.784	1	4.990.500	-	-	1	4.990.500	-	-	-	-	Kec. Sindang Jaya
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	7	342.412.656	7	242.674.708	7	342.412.656	7	44.707.467	-	-	7	44.707.467	-	-	-	-	Kec. Sindang Jaya
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	15	938.426.784	15	990.237.000	15	938.426.784	15	282.120.000	-	-	15	282.120.000	-	-	-	-	Kec. Sindang Jaya
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	28	1.770.984.772	28	1.387.394.972	28	1.770.984.772	7	848.602.963	-	-	7	848.602.963	-	-	-	-	Kec. Sindang Jaya
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2	172.124.800	2	162.005.476	2	172.124.800	2	39.210.798	-	-	2	39.210.798	-	-	-	-	Kec. Sindang Jaya

Sasaran	Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024-2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									I		II								
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4	112.089.992	4	95.624.496	4	112.089.992	4	10.698.165	-	-	4	10.698.165	-	-	-	-	Kec. Sindang Jaya
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	39	85.250.000	39	23.040.000	39	85.250.000	10	-	-	-	10	-	-	-	-	-	Kec. Sindang Jaya
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7	1.401.519.980	7	1.106.725.000	7	1.401.519.980	4	798.694.000	-	-	4	798.694.000	-	-	-	-	Kec. Sindang Jaya
Meningkatnya Pelayanan Publik sesuai dengan Standar Kecamatan			**100**	**7.533.946.147**	**100**	**5.790.573.291**	**100**	**7.533.946.147**	**25**	**711.543.200**	**-**	**-**	**25**	**711.543.200**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Kec. Sindang Jaya**
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar**	**100**		**100**		**100**		**25**		**-**	**-**	**25**		**-**	**-**	**-**	**-**	**Kec. Sindang Jaya**
		Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara	2	51.388.015	2	76.579.600	2	51.388.015	0	14.686.200	-	-	0	14.686.200	-	-	-	-	Kec. Sindang Jaya
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah laporan pelayanan	2	51.388.015	2	76.579.600	2	51.388.015	0	14.686.200	-	-	0	14.686.200	-	-	-	-	Kec. Sindang Jaya
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	30	7.482.558.132	30	5.713.993.691	30	7.482.558.132	7	696.857.000	-	-	7	696.857.000	-	-	-	-	Kec. Sindang Jaya
	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah dokumen pemeliharaan	41	7.482.558.132	41	5.713.993.691	41	7.482.558.132	10	696.857.000	-	-	10	696.857.000	-	-	-	-	Kec. Sindang Jaya

Sasaran	Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024-2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									I		II								
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	87	2.459.990.700	85	1.378.355.700	87	2.459.990.700	15	779.014.150	-	-	15	779.014.150	-	-	-	-	Kec. Sindang Jaya
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Prosentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan**	**5**	**2.459.990.700**	**5**	**1.378.355.700**	**5**	**2.459.990.700**	**1**	**779.014.150**	**-**	**-**	**1**	**779.014.150**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Kec. Sindang Jaya**
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Pemberdayaan	7	120.964.500	7	99.512.400	7	120.964.500	7	120.964.500	-	-	7	120.964.500	-	-	-	-	Kec. Sindang Jaya
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga kemasyarakatan yang Berpatisipasi dalam Forum Musyawarah perencanaan pembangunan Di Desa	10	2.339.026.200	10	1.278.843.300	10	2.339.026.200	3	658.049.650	-	-	3	658.049.650	-	-	-	-	Kec. Sindang Jaya
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100	71.857.000	100	190.356.800	100	71.857.000	25	9.384.000	-	-	25	9.384.000	-	-	-	-	Kec. Sindang Jaya
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti**	**4**	**71.857.000**	**4**	**190.356.800**	**4**	**71.857.000**	**1**	**9.384.000**	**-**	**-**	**1**	**9.384.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Kec. Sindang Jaya**
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan gangguan trantibum	4	71.857.000	4	190.356.800	4	71.857.000	1	9.384.000	-	-	1	9.384.000	-	-	-	-	Kec. Sindang Jaya
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	100	47.999.500	100	159.559.030	100	47.999.500	25	4.686.500	-	-	25	4.686.500	-	-	-	-	Kec. Sindang Jaya
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti**	**87**	**47.999.500**		**159.559.030**	**87**		**15**		**-**	**-**	**15**		**-**	**-**	**-**	**-**	**Kec. Sindang Jaya**

Sasaran	Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024-2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									I		II								
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah rekomendasi yang dikeluarkan	10	23.508.500	10	31.847.000	10	47.999.500	1	4.686.500	-	-	1	4.686.500	-	-	-	-	Kec. Sindang Jaya
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	50	24.491.000	50	127.712.030	50	23.508.500	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Kec. Sindang Jaya
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1	165.432.200	1	214.176.500	1	24.491.000	0	4.686.500	-	-	0	4.686.500	-	-	-	-	Kec. Sindang Jaya
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**Persentase pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa**	**100**	**165.432.200**	**100**	**214.176.500**	**100**	**165.432.200**	**25**	**24.725.000**	**-**	**-**	**25**	**24.725.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Kec. Sindang Jaya**
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	7	90.530.000	7	99.160.000	7	165.432.200	1	24.725.000	-	-	1	24.725.000	-	-	-	-	Kec. Sindang Jaya
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	7	74.902.200	7	115.016.500	7	90.530.000	7	24.725.000	-	-	7	24.725.000	-	-	-	-	Kec. Sindang Jaya
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	7		7		7	74.902.200	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Kec. Sindang Jaya

Berdasarkan tabel 2 (Tabel E.81) Evaluasi Terhadap Hasil Renja Kecamatan Sindang Jaya sampai dengan Triwulan ke 2 Tahun 2024, berikut analisis dari tabel tersebut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, beberapa kegiatan yang menunjang sasaran kinerja telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai anggaran kas. Terdapat tiga kegiatan yang masih belum dilaksanakan dikarenakan kegiatan ini direncanakan akan dilaksanakan pada triwulan 3.
2. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum, seluruh kegiatan terserap dengan baik dan sesuai anggaran kas.
3. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa sudah mencapai target kinerja 7 desa yang dilakukan pengasawan dan pembinaan sampai dengan triwulan II ini sudah melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap 7 desa tersebut.
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, seluruh kegiatan terserap dengan baik dan sesuai anggaran kas.
5. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, seluruh kegiatan terserap dengan baik dan sesuai anggaran kas.
6. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, seluruh kegiatan terserap dengan baik dan sesuai anggaran kas

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Sindang Jaya

Perangkat Daerah Kecamatan Sindang Jaya Kabupaten Tangerang, merupakan Lembaga Teknis Daerah sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah dalam perencanaan pembangunan. Pencanangan pembangunan yang berkualitas dan professional dapat menjadi wahana untuk memperbaiki pola pembangunan di tingkat daerah, sehingga daerah dapat berkiprah dengan leluasa untuk membangun daerahnya sesuai potensi dan kemampuan yang ada (potensi lokal).

Perangkat Daerah Kecamatan Sindang Jaya yang berfungsi sebagai Perangkat Daerah Koordinatif dan Pelayanan masyarakat mempunyai tujuan utamanya adalah untuk kepuasan pelayanan masyarakat secara umum, capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Sindang Jaya dapat dicapai bila Indeks Kepuasan Masyarakat tercapai sesuai dengan target. Untuk mendapatkan kepuasan Masyarakat dengan Indeks Kepuasan Masyarakat yang tinggi perlu adanya Standar Pelayanan Minimal (SPM) karena SPM merupakan tolok ukur bagi aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Kegiatan pelayanan di Kecamatan Sindang Jaya tidak hanya memberikan sarana dan prasarana yang baik untuk masyarakat, namun juga memberikan pelayanan prima dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

Pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Sindang Jaya dapat dilihat sebagaimana Tabel 3 (T-C.30) berikut :

Tabel 3 (T-C.30)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Kabupaten Tangerang

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisassi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	

1	Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban Umum	Persen	30	40	-	-		30	40	-	-	
2	Nilai Sakip Kecamatan Sindang Jaya											
3	Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	89,1	89,25	-	-	-	88,95	89,5	-	-	
4	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	Nilai	-	-	89,26	89,27	89,28	-	-	89,26	89,27	
5	Nilai AKIP	Nilai	-	-	60,8	60,9	61	-	-	60,8	60,9	

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Sindang Jaya Tahun 2023 sebagai berikut :

1. Capaian kinerja yang melebih/melampaui target ditunjukan pada indikator Indeks Kepuasan Masyarakat, dengan capaian kinerja 100,28 %.
2. Capaian kinerja yang sesuai target atau mencapai 100% ditunjukan pada indikator Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum, dengan capaian kinerja 100 %.
3. Capaian kinerja yang belum mencapai target ditunjukkan pada indikator Nilai AKIP Kecamatan Sindang Jaya dengan capaian kinerja 75,94 %.

Adapun beberapa hal yang perlu dilakukan untuk keberhasilan pelaksanaan dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, antara lain :

1. Memberikan pelatihan bagi pegawai sesuai dengan bidang tugasnya.
2. Meningkatkan sistem pelayanan di Kecamatan Sindang Jaya dengan cara berkoordinasi dengan Dinas terkait.
3. Meningkatkan kualitas ruang pelayanan untuk meningkatkan kenyamanan dan kebersihan ruang pelayanan.
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Sindang Jaya

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Sindang Jaya bahwa ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut :

1. Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Tangerang kepada Camat di bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah. Dengan adanya penyerahan Sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam

mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Tangerang;

2. Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai factor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur;
3. Pelayanan Prima. Kecamatan sebagai salah satu SKPD di Pemerintah Kabupaten Tangerang yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan Kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamikan aktivitas masyarakat;
4. Peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dan segala kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan, karena tidak mungkin terwujud suatu pelaksanaan kegiatan dan pembangunan tanpa dukungan masyarakat. Karena semua yang dilaksanakan oleh Kecamatan tujuannya adalah demi kepentingan masyarakat di Kecamatan Sindang Jaya. Peran serta masyarakat yang sekarang ini terlibat dalam kegiatan yaitu kegiatan musrenbang, fasilitasi pemeliharaan kebersihan dan kegiatan PNPM;
5. Ketahanan pangan masyarakat yang harus dikuatkan melalui pertanian dan peternakan, sehingga perlu adanya pelatihan-pelatihan kepada masyarakat baik yang menyangkut tehnik di lapangan maupun pemasarannya serta perlunya dukungan peralatan yang memadai demi meningkatkan hasil dari pertanian dan peternakan. Dan pendukung pengairan pertanian masyarakat yang dangat diperhatikan demi mendukung peningkatan kualitas pertanian;
6. Dunia usaha dan investasi yang kian hari semakin berkembang perlu dipersiapkan sumber daya manusia yang mampu bersaing dalam dunia usaha dan sesuai dengan kebutuhan industri, sehingga masyarakat Sindang Jaya dapat menempati posisi-posisi yang telah disediakan oleh perusahaan sehingga akan meningkatkan tarap perekonomian masyarakat. Sehingga jumla masyarakat miskin di Kecamatan Sindang Jaya dapat berkurang;
7. Akses ke kota Kecamatan dan pada pelayanan pendidikan dan kesehatan yang semakin memadai dapat dinikmati masyarakat, sehingga tidak ada masyarakat yang tidak merasakan pelayanan kesehatan dan pendidikan. Dan infrasturuktur pendidikan serta kesehatan yang terus dibenahai sehingga masyarakat akan merasa nyaman dalam mendapatkan pelayananannya.

Untuk menjawab isu isu di kecamatan Sindang Jaya maka dibentuklah beberapa kebijakan perencanaan kegiatan di kecamatan Sindang Jaya adalah sebagai berikut :

1. Gerakan Bersama Atasi Kemiskinan Ekstream dan Stunting (Gebrak Tegas) Pencegahan dan penurunan Stunting dan penghapusan kemiskinan ekstream berupa Pemberian Makanan Tambahan (PMT) balita Stunting, rembuk stunting.
2. Penyelenggaraan pemberdayaan keluarga prasejahtera.
3. Verifikasi dan validasi data pengangguran.
4. Kecamatan tanggap bencana dan penanganan pasca bencana.
5. Pengembangan Produk Unggulan Kecamatan, melalui Pembinaan UMKM.
6. Pengembangan Inovasi Kecamatan.
7. Pengelolaan Sampah berupa Pembentukan Bank Sampah, Bio Konversi dan Sirkular Ekonomi.
8. Rehabilitasi RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) dan Rehabilitas yang terdampak bencana.
9. Pemeliharaan Stadion Mini.
10. Pengangkutan sampah dari tempat pembuangan sampah sementara sampai tiba di tempat pembuangan sampah di akhir untuk wilayah sekitar jalan desa/kelurahan.

2.4 Review terhadap Rancangan RKPD Perubahan

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Sindang Jaya Tahun 2025 merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam arah kebijakan RPJPD Kabupaten Tangerang tahun 2024-2026 yang dijabarkan dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sindang Jaya Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026. Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Kecamatan Sindang Jaya Tahun 2024 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 Dalam konteks perencanaan pembangunan, Kecamatan Sindang Jaya Kabupaten Tangerang dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan, melayani/memenuhi kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, dalam era globalisasi, Kecamatan Sindang Jaya dituntut untuk siap dan sanggup membuat/menyusun suatu perencanaan yang baik, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Untuk lebih jelasnya mengenai review rancangan RKPD Perubahan Tahun 2024 dapat dilihat Tabel 4 (T-C.31) berikut ini:

Table 4 (T-C.31)
Review terhadap Rancangan RKPD Perubahan tahun 2024
Kecamatan Sindang Jaya Kabupaten Tangerang

RANCANGAN RKPD PERUBAHAN 2025				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				CATATAN PENTING
PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
UNSUR KEWILAYAHAN								
KECAMATAN								
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan**	**100**	**9.295.868.013**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan**	**100**	**9.295.868.013**	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11	193.422.875	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11	193.422.875	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7	83.973.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7	83.973.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	73.410.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	73.410.000	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	36.039.875	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	36.039.875	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan	2	4.586.192.802	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan	2	4.586.192.802	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20	4.559.244.862	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20	4.559.244.862	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4	26.947.940	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4	26.947.940	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang difasilitasi	20	176.481.600	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang difasilitasi	20	176.481.600	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	20	48.898.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	20	48.898.000	

RANCANGAN RKPD PERUBAHAN 2025				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				CATATAN PENTING
PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20	127.583.600	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20	127.583.600	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	8	1.237.131.640	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	8	1.237.131.640	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5	31.806.300	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5	31.806.300	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15	785.552.240	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15	785.552.240	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12	40.166.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12	40.166.000	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	18	98.204.400	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	18	98.204.400	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5	66.631.700	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5	66.631.700	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2	68.640.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2	68.640.000	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1080	81.081.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1080	81.081.000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	400	65.050.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	400	65.050.000	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah	2	33.706.100	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah	2	33.706.100	
Pengadaan Mebel	Tersedianya mebel	2	33.706.100	Pengadaan Mebel	Tersedianya mebel	2	33.706.100	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang	2	1.297.948.224	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang	2	1.297.948.224	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	17.108.784	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	17.108.784	

RANCANGAN RKPD PERUBAHAN 2025				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				CATATAN PENTING
PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	7	342.412.656	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	7	342.412.656	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	15	938.426.784	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	15	938.426.784	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	28	1.770.984.772	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	28	1.770.984.772	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2	172.124.800	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2	172.124.800	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4	112.089.992	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4	112.089.992	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	39	85.250.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	39	85.250.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7	1.401.519.980	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7	1.401.519.980	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar**	**100**	**7.533.946.147**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar**	**100**	**7.533.946.147**	
	Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara	100			Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara	100		
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah laporan pelayanan	2	51.388.015	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah laporan pelayanan	2	51.388.015	
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2	51.388.015	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2	51.388.015	
Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah dokumen pemeliharaan	30	7.482.558.132	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah dokumen pemeliharaan	30	7.482.558.132	

RANCANGAN RKPD PERUBAHAN 2025				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				CATATAN PENTING
PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	41	7.482.558.132	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	41	7.482.558.132	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Prosentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan**	**87**	**2.459.990.700**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Prosentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan**	**87**	**2.459.990.700**	
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Pemberdayaan	5	2.459.990.700	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Pemberdayaan	5	2.459.990.700	
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga kemasyarakatan yang Berpatisipasi dalam Forum Musyawarah perencanaan pembangunan Di Desa	7	120.964.500	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga kemasyarakatan yang Berpatisipasi dalam Forum Musyawarah perencanaan pembangunan Di Desa	7	120.964.500	
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10	2.339.026.200	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10	2.339.026.200	
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti**	**100**	**71.857.000**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti**	**100**	**71.857.000**	
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan gangguan trantibum	4	71.857.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan gangguan trantibum	4	71.857.000	
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4	71.857.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4	71.857.000	
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti**	**100**	**47.999.500**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti**	**100**	**47.999.500**	
	Persentase tertib administrasi pemerintahan desa	87			Persentase tertib administrasi pemerintahan desa	87		
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah rekomendasi yang dikeluarkan	10	47.999.500	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah rekomendasi yang dikeluarkan	10	47.999.500	

RANCANGAN RKPD PERUBAHAN 2025				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				CATATAN PENTING
PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	50	23.508.500	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	50	23.508.500	
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1	24.491.000	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1	24.491.000	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**Persentase pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa**	**100**	**165.432.200**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa**	**100**	**165.432.200**	
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	7	165.432.200	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	7	165.432.200	
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	7	90.530.000	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	7	90.530.000	
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	7	74.902.200	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	7	74.902.200	

2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan Program dan Kegiatan Kecamatan Sindang Jaya pada tahun 2025 dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum dan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati dalam rangka penguatan otonomi daerah diarahkan pada :

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang menjadi kewenangan kecamatan dan peningkatan kualitas aparaturnya;
2. Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan desa;
3. Upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, dan koordinasi dengan Muspika yang ada di Kecamatan Sindang Jaya.
4. Mendorong kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi; Peningkatan semua infrastruktur yang ada di desa-desa se Kecamatan Sindang Jaya baik sarana jalan, irigasi dan saluran-saluran air serta sarana Pendidikan serta kesehatan.

Telaah usulan Program dan Kegiatan masyarakat ini didasari oleh pemikiran masyarakat melalui musrenbang yang telah dilakukan dan perlunya peningkatan peran serta masyarakat dalam melaksanakan musyawarah pembangunan baik yang dilaksanakan di desa maupun di Kecamatan.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN SINDANG JAYA

Dalam pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh OPD, diperlukan suatu perencanaan yang akan dijalankan di tahun mendatang. Perencanaan ini berisi program kegiatan menjadi tanggung jawab masing-masing OPD. Untuk OPD Kecamatan Sindang Jaya akan melaksanakan Program dan kegiatan sebagaimana pada tabel berikut ini :

Tabel 6
Rencana Kerja Dan Pendanaan Perubahan Kecamatan Sindang Jaya Tahun 2025

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025					
		TARGET CAPAIAN KINERJA		PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	BERTAMBAH BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan**	**100**	**100**	**9.295.868.013**	**9.295.868.013**	**9.295.868.013**	**-**
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11	11	193.422.875	193.422.875	193.422.875	-
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7	7	83.973.000	83.973.000	83.973.000	-
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	4	73.410.000	73.410.000	73.410.000	-
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	1	36.039.875	36.039.875	36.039.875	-
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan	2	2	4.586.192.802	4.586.192.802	4.586.192.802	-
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20	20	4.559.244.862	4.559.244.862	4.559.244.862	-
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4	4	26.947.940	26.947.940	26.947.940	-
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang difasilitasi	20	20	176.481.600	176.481.600	176.481.600	-
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	20	20	48.898.000	48.898.000	48.898.000	-
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20	20	127.583.600	127.583.600	127.583.600	-
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	8	8	1.237.131.640	1.237.131.640	1.237.131.640	-
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5	5	31.806.300	31.806.300	31.806.300	-

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025					
		TARGET CAPAIAN KINERJA		PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	BERTAMBAH BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15	15	785.552.240	785.552.240	785.552.240	-
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12	12	40.166.000	40.166.000	40.166.000	-
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	18	18	98.204.400	98.204.400	98.204.400	-
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5	5	66.631.700	66.631.700	66.631.700	-
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2	2	68.640.000	68.640.000	68.640.000	-
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1080	1080	81.081.000	81.081.000	81.081.000	-
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	400	400	65.050.000	65.050.000	65.050.000	-
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah	2	2	33.706.100	33.706.100	33.706.100	-
Pengadaan Mebel	Tersedianya mebel	2	2	33.706.100	33.706.100	33.706.100	-
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang	2	2	1.297.948.224	1.297.948.224	1.297.948.224	-
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	1	17.108.784	17.108.784	17.108.784	-
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	7	7	342.412.656	342.412.656	342.412.656	-
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	15	15	938.426.784	938.426.784	938.426.784	-
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	28	28	1.770.984.772	1.770.984.772	1.770.984.772	-
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2	2	172.124.800	172.124.800	172.124.800	-
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4	4	112.089.992	112.089.992	112.089.992	-
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	39	39	85.250.000	85.250.000	85.250.000	-

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025					
		TARGET CAPAIAN KINERJA		PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	BERTAMBAH BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7	7	1.401.519.980	1.401.519.980	1.401.519.980	-
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar**	**100**	**100**	**7.533.946.147**	**7.533.946.147**	**7.533.946.147**	**-**
	Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara	**100**	**100**				**-**
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah laporan pelayanan	2	2	51.388.015	51.388.015	51.388.015	-
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2	2	51.388.015	51.388.015	51.388.015	-
Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah dokumen pemeliharaan	30	30	7.482.558.132	7.482.558.132	7.482.558.132	-
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	41	41	7.482.558.132	7.482.558.132	7.482.558.132	-
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Prosentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan**	**87**	**87**	**2.459.990.700**	**2.459.990.700**	**2.459.990.700**	**-**
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Pemberdayaan	5	5	2.459.990.700	2.459.990.700	2.459.990.700	-
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga kemasyarakatan yang Berpatisipasi dalam Forum Musyawarah perencanaan pembangunan Di Desa	7	7	120.964.500	120.964.500	120.964.500	-
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10	10	2.339.026.200	2.339.026.200	2.339.026.200	-
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti**	**100**	**100**	**71.857.000**	**71.857.000**	**71.857.000**	**-**
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan gangguan trantibum	4	4	71.857.000	71.857.000	71.857.000	-
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,	4	4	71.857.000	71.857.000	71.857.000	-

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025					
		TARGET CAPAIAN KINERJA		PAGU INDIKATIF (Rp)			
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	BERTAMBAH BERKURANG
1	2	3	4	5	6	7	8
Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan						
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti**	**100**	**100**	**47.999.500**	**47.999.500**	**47.999.500**	**-**
	Persentase tertib administrasi pemerintahan desa	87	87				-
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah rekomendasi yang dikeluarkan	10	10	47.999.500	47.999.500	47.999.500	-
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	50	50	23.508.500	23.508.500	23.508.500	-
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1	1	24.491.000	24.491.000	24.491.000	-
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**Persentase pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa**	**100**	**100**	**165.432.200**	**165.432.200**	**165.432.200**	**-**
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	7	7	165.432.200	165.432.200	165.432.200	-
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	7	7	90.530.000	90.530.000	90.530.000	-
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	7	7	74.902.200	74.902.200	74.902.200	-

BAB IV
PENUTUP

Renja Perubahan Kecamatan Sindang Jaya Kabupaten Tangerang Tahun 2025 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Kecamatan Sindang Jaya Kabupaten Tangerang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal hal sebagai berikut :

4.1 Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Renja Perubahan Kecamatan Sindang Jaya Kabupaten Tangerang Tahun 2025 antara lain :

1. Perumusan program dan kegiatan beserta indikatornya pada Renja Perubahan Kecamatan Sindang Jaya Kabupaten Tangerang pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tangerang;
2. Penyusunan Renja Perubahan Kecamatan Sindang Jaya Kabupaten Tangerang 2025 merupakan pedoman dalam melakukan kegiatan kecamatan pada tahun 2025 setelah dilakukan evaluasi pada tahun berjalan sampai dengan Triwulan ke 2 tahun 2025. Selain itu terdapat penyesuaian penambahan dan pengurangan anggaran/kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Kecamatan Sindang Jaya;
3. Anggaran pada Renja Perubahan Kecamatan Sindang Jaya mengalami perubahan dari Renja Murni 2025 dikarenakan adanya penyesuaian kebutuhan pada Kecamatan Sindang Jaya;
4. Penyusunan Renja Perubahan Kecamatan Sindang Jaya Kabupaten Tangerang ini juga berpedoman pada RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2025, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

4.2 Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Renja Perubahan Kecamatan Sindang Jaya Kabupaten Tangerang Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

4.2.1. Seluruh Seksi dan Sub Bagian berkewajiban untuk melaksanakan program- program yang terdapat pada dokumen Renja Perubahan Kecamatan Sindang Jaya dengan berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Tangerang, serta masyarakat maupun stake holder;

4.2.2. Dalam rangka menjamin tercapainya target indikator kinerja daerah dalam Renja Perubahan Kecamatan Sindang Jaya diperlukan langkah-langkah optimalisasi pelaksanaan kegiatan yang dipedomani dan dijabarkan dalam penyusunan rancangan program kerja.

4.3 Rencana Tindak Lanjut

Rencana Tindak Lanjut dari penyusunan dokumen Renja Perubahan Kecamatan Sindang Jaya Kabupaten Tangerang ini adalah melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan serta melaksanakan pengendalian setiap triwulan baik untuk realisasi anggaran maupun atas kinerja yang telah ditetapkan. Keberhasilan pelaksanaan Renja Perubahan ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Kecamatan Sindang Jaya Kabupaten Tangerang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan stakeholder pembangunan di Kabupaten Tangerang.

Demikian dengan tersusunnya Renja Perubahan Kecamatan Sindang Jaya ini semoga dapat menjadi pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan di Tahun 2025 Kecamatan Sindang Jaya Kabupaten Tangerang agar dapat terwujud konsistensi antara perencanaan penganggaran serta pelaksanaan program dan kegiatan di Kecamatan Sindang Jaya dan tersusunnya Renja Perubahan Kecamatan Sindang Jaya Tahun 2025 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian visi Pemerintah Kabupaten Tangerang

56. Kecamatan Kelapa Dua

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rencana kerja SKPD Kecamatan Kelapa Dua tahun 2025 merupakan merupakan rencana kerja tahunan yang menjabarkan pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan dalam Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan KeIapa Dua. Renja SKPD Kecamatan Kelapa dua mengacu kepada Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Sebagai tolak ukur keberhasilan pembangunan dengan memperhatikan 15 Program Unggulan Kabupaten Tangerang sebagai indikator keberhasilan dan evaluasi kebijakan pembangunan. Dalam konteks pelaksanaan pembangunan Kecamatan Kelapa Dua dituntut untuk mampu melaksanakan tugas dan kewenangan yang telah diberikan Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan pembangunan yang ada di Kecamatan Kelapa Dua sesuai dengan aspirasi masyarakat. Ini semua demi kesejahteraan
masyarakat Kecamatan Kelapa Dua.

Proses penysusunan Rencana Kerja Kecamatan Kelapa Dua Tahun 2025 berdasarkan kepada Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Kelapa Dua Tahun 2025-2026 dengan tetap memperhatikan program prioritas, agar didalam pelaksanaan program/ kegiatan terwujud sinergitas antar dokumen perencanaan, sehingga dapat memenuhi indikator keberhasilan yang telah ditetapkan.

B. Landasan Hukum

1. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
5. Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembar Negara Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826
14. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4578)
16. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/200/II/BANGDA/2008; perihal pedoman penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 11).
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor :

86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja Kantor Kecamatan Kelapa Dua adalah menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program, dan kegiatan yang menjadi tolak ukur dan alat bantu bagi unit-unit kerja yang ada padalingkungan Kecamatan Kelapa Dua untuk secara konsekuen dan konsisten menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Tujuan dari Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Kantor Kecamatan Kelapa Dua adalah guna merumuskan program dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kantor Kecamatan Kelapa Dua Tahun 2025.

D. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan secara ringkas tentang latar belakang renja PD, prosespenyusunan, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI TRIWULAN II

Menguraikan hasil evaluasi anggaran dan capaian kinerja renja tahun 2025

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Menguraikan rencana kerja dan pendanaan Kecamatan Kelapa Dua Tahun Anggaran 2025.

BAB IV PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI TRIWULAN II

A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Sampai Dengan Triwulan II

Kecamatan Kelapa Dua pada tahun anggaran 2025 disediakan anggaran untuk Kecamatan Kelapa Dua sebesar **Rp.46.070.911.159,** Dari Anggaran tersebut **sampai dengan triwulan 2 tanggal 17 Juni** sudah terealisasi sebesar **Rp. 20.768.872.933** mencapai 45,08 % . Belum terserapnya keseluruhan Anggaran di Kecamatan Kelapa Dua dikarenakan pelaksanaan kegiatan baru sampai dengan triwulan ke 2 dan sedang berjalan triwulan ke 3.

Berikut akan disajikan Tabel Review Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Kelapa Dua tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra Kecamatan Kelapa Dua, yang bertujuan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan PD dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra SKPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Review didasarkan atas laporan hasilevaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun- tahun sebelumnya dan perkiraan pelaksanaan DPA Kecamatan Kelapa Dua.

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Kecamatan Kelapa Dua Tahun sebelumnya dan tahun berjalan 2024, untuk lebih detailnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2 (T-C.29)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 Kabupaten Tangerang

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Kelapa Dua

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (n-2) 2023			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Mei tahun berjalan	
					Target Kinerja Renja PD Tahun (n-2) 2023	Realisasi Kinerja Renja PD Tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100,00%**	**100%**	**300%**	**300%**
7.01.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	5	5	5	100,00%	5	15	300%
7.01.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan	2	2	2	2	100,00%	2	6	300%
7.01.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang difasilitas	53	53	53	53	100,00%	53	159	300%
7.01.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	8	8	8	8	100,00%	8	24	300%
7.01.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang	3	3	3	3	100,00%	3	9	300%
7.01.01.2.09	Kegiatan :Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4	4	4	4	80,00%	4	12	280%

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (n-2) 2023			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Mei tahun berjalan	
					Target Kinerja Renja PD Tahun (n-2) 2023	Realisasi Kinerja Renja PD Tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik Kecamatan Kelapa Dua**	**98,15%**	**85,00%**	**88,00%**	**88,00%**	**100%**	**98,15%**	**271,15%**	**276%**
		Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar Kecamatan Kelapa Dua	**83%**	**76%**	**80,00%**	**80,00%**	**100%**	**83%**	**239%**	**288%**
7.01.02.2.02	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Tersedianya pemenuhan sarana dan prasarana Paten di Kecamatan	6	4	6	6	100%	6	16	267%
7.01.02.2.03	Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah infrastruktur yang dipelihara	30	25	25	23	92%	30	78	260%
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaa Kec. Kelapa Dua**	**79%**	**75%**	**78,00%**	**78,00%**	**100%**	**79%**	**232%**	**294%**
7.01.03.2.01	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan/pemberdayaa	5	2	5	5	100%	5	12	264%
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana Kelurahan yang dibangun	16	16	16	16	100%	16	48	282%

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (n-2) 2023			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Mei tahun berjalan	
					Target Kinerja Renja PD Tahun (n-2) 2023	Realisasi Kinerja Renja PD Tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti**	**72,50%**	**57,14%**	**65%**	**65%**	**100%**	**72,50%**	**194,64%**	**268%**
7.01.04.2.01	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	7	6	6	6	100%	7	19	271%
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Presentase Desa Dengan Laporan Administrasi baik**	**89,15%**	**77,77%**	**80%**	**80%**	**100%**	**89,15%**	**246,92%**	**277%**
5.1.01.01	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Sub Kegiatan	Jumlah Desa yang difasilitasi	1	1	1	1	100%	1	1	300%
7.1.6.01	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti**	**80%**	**-**	**-**	**-**	**-**	**80%**	**80%**	**100%**
7.1.6.01.2.09	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti pembinaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	3	-	-	-	-	3	3	100%

B. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Kelapa Dua

Perangkat Daerah Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang, merupakan Lembaga Teknis Daerah sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah dalam perencanaan pembangunan. Pencanangan pembangunan yang berkualitas dan professional dapat menjadi wahana untuk memperbaiki pola pembangunan di tingkat daerah, sehingga daerah dapat berkiprah dengan leluasa untuk membangun daerahnya sesuai potensidan kemampuan yang ada (potensi lokal).

Perangkat Daerah Kecamatan Kelapa Dua yang berfungsi sebagai Perangkat Daerah Koordinatif dan Pelayanan masyarakat mempunyai tujuan utamanya adalah untuk kepuasan pelayanan masyarakat secara umum, capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Kelapa Dua dapat dicapai bila Indeks Kepuasan Masyarakat tercapai sesuai dengan target. Untuk mendapatkan kepuasan Masyarakat dengan Indeks Kepuasan Masyarakat yang tinggi perlu adanya Standar Pelayanan Minimal (SPM) karena SPM merupakan tolok ukur bagi aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Kegiatan pelayanan di Kecamatan Kelapa Dua tidak hanya memberikan sarana dan prasarana yang baik untuk masyarakat, namun juga memberikan pelayanan prima dan melakukan berbagi pelayanan tambahan seperti sosialisasi, pengarahan dan edukasi secara offline maupun online.

Adapun beberapa hal yang perlu dilakukan untuk keberhasilan pelaksanaan dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, antara lain :

1. Memberikan pelatihan bagi pegawai sesuai dengan bidang tugasnya.
2. Meningkatkan sistem pelayanan di kecamatan Kelapa Dua dengan cara berkoordinasi dengan Dinas terkait.
3. Meningkatkan kualitas ruang pelayanan untuk meningkatkan kenyamanan dan kebersihan ruang pelayanan.
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarak

Pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Kelapa Dua dapat dilihatsebagaimana Tabel 3 berikut :

Tabel 3 (T-C.30)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat	86	88,2	88,8	89	86	87	87,8	89	Telah sesuai target capaian target Renstra PD

C. Isu-Isu Penyelenggaraaan Tugas dan Fungsi SKPD

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan Kelapa Dua yang berkaitan dengan Tugas Umum Pemerintahan dapat diidentifikasi 3 (tiga) klasifikasi permasalahan pelayanan Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang yaitu permasalahan pada tataran kebijakan, Program Kegiatan dan Teknis Operasional.

Pada tataran kebijakan Pemerintah Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang dapat dilihat kondisi pelayanan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang yang dapat dilihat dari masih rendahnya Nilai IKM dan Nilai LAKIP Kecamatan Kelapa Dua.

Pada tingkat implementasi Program dan Kegiatan pada Bagian/Unit Kerja di Lingkungan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang dapat diidentifikasi kondisi pelayanan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang, sebagai berikut :

1. Tidak adanya standar waktu dalam penyelesaian pelayanan yaitu terkesan lama pencapaian waktu sekitar seminggu untuk pelayanan Administrasi Kependudukan.
2. Sikap pegawai dalam melayani masih terkesan kurang ramah
3. Minimnya tenaga kerja PNS pada Kelurahan dan Desa
4. Rendahnya Sarana dan Prasarana Kerja yang berteknologi tinggi yang dapat menunjang lainnya untuk mempermudah pelayanan public kepada masyarakat.

Permasalahan teknis operasional yang dapat diidentifikasi dari pelayanan Kecamatan Kelapa Dua:

a. Kurangnya SDM Kecamatan dan Kelurahan;
b. Kurang optimalnya pelaporan Kecamatan dan Kelurahan Program dan Kegiatan kepada Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang;
c. Kurang optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam membantu kelancaran pelaksana tugas dan pelayanan

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintah yang dilimpahkan Bupati kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah adalah factor internal dan eksternal Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang, masalah internal yang mempengaruhi Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang antara lain :

1. Jumlah dan kapasitas aparat belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas dan belum sesuai dengan beban kerja.
2. Masih lemahnya pemahaman Tupoksi para aparat Pemerintah mengakibatkan tidak maksimalnya hasil koordinasi
3. Pola pembinaan aparat yang belum terorientasikan pada peningkatan kinerja
4. Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata dalam suatu system yang terpadu, efektif dan efisien.

Sedangkan masalah eksternal yang mempengaruhi kinerja Pemerintah Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang adalah :

1. Adanya multi interpretassi terhadap pelimpahan kewenangan kepada Camat dan Lurah yang dapat menimbulkan dampak hukum kedepan.
2. Rendahnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan

(partisipasi publik) dalam pembangunan.
3. Rendahnya kapasitas dan peran pihak swasta/akademisi dalam pembangunan.

Berdasarkan data dan informasi tersebut diatas secara umum isu-isu strategis yang hadapi oleh Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang dalam masa waktu 2024-2024, adalah sebagai berikut :

I. Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Pelayanan Publik)

Birokrasi Pemerintah Daerah merupakan faktor yang sangat menentukan berjalannya penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu reformasi birokrasi pemerintah daerah sejak dicanangkan pada tahun 2005, senantiasa harus dilanjutkan secara teru menerus sehingga mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan di masa depan yang semakin kompleks dan beragam sejalan dengan perkembangan dan perubahan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, tuntutan masyarakat serta dinamika global yang senantiasa mempengaruhi manajemen penyelenggaraan pemerintah daerah.

1. Reformasi birokrasi pemerintah daerah yang harus dilakukan ditingkat Kecamatan sebagaimana sasaran yang telah dicanangkan adalah peningkatn pelayanan publik, akuntabilitas dan kapasitas aparatur yang bersih dari KKN.

D. Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Kelapa Dua Tahun 2025 merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam arah kebijakan RPJPD Kabupaten Tangerang tahun 2024-2026 yang dijabarkan dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026. Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Kecamatan Kelapa Dua Tahun 2025 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017. Dalam konteks perencanaan pembangunan, Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan, melayani/memenuhi kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, dalam era globalisasi, Kecamatan Kelapa Dua dituntut untuk siap dan sanggup membuat/menyusun suatu perencanaan yang baik, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Untuk lebih jelasnya mengenai review rancangan RKPD Perubahan Tahun 2025 dapat dilihat Tabel Berikut Ini :

Tabel (T-C.32)
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kabupaten Tangerang

NO	Prioritas Daerah	Usulan Kegiatan Prioritas	MANFAAT/SASARAN KEGIATAN	Lokasi	Volume	Pagu	OPD Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7	8
KOMPOSISI SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)							
1	Meningkatkan Pembangunan SDM Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kompetensi Generasi Muda Melalui Pelatihan Broadcast, Digital Marketing, Branding	Meningkatnya Keahlian Keterampilan Bagi Pemuda	Kelurahan Kelapa Dua	60 Orang	200.000.00	Dinas Tenaga Kerja
2	Meningkatkan Pembangunan SDM Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pelatihan Keterampilan Kader Membuat Dan Menghias Hantaran Pernikahan	Meningkatnya Keahlian Keterampilan Bagi Kader	Kelurahan Bojong Nangka	60 Orang	200.000.00	Dinas Tenaga Kerja
3	Meningkatkan Pembangunan SDM Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pelatihan Kreatifitas Kepemudaan (Barista)	Meningkatnya Keahlian Keterampilan Bagi Pemuda	Kelurahan Pakulonan Barat	60 Orang	200.000.00	Dinas Tenaga Kerja
4	Meningkatkan Pembangunan SDM Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Taman Bacaan Masyarakat (TBM) Di Ruang Terbuka Publik Stadion Mini	Tersedianya Taman Baca Masyarakat (TBM)	Area Kawasan Stadion Mini Kelurahan Bencongan	1 Paket	300.000.00	Dinas Perpustakaan Dan Arsip
5	Meningkatkan Pembangunan SDM Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Rehab Total GedungPuskesmas Bojong Nangka	Meningkatnya Kualitas Gedung Puskesmas	Puskesmas Bojong Nangka	1 Paket	4.000.000.00	Dinas Kesehatan
6	Meningkatkan Pembangunan SDM Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Rehab Gedung Puskesmas Jl. Emas (Renovasi Pagar dan Penambahan Ruang Pelayanan Puskesmas)	Meningkatnya Kualitas Bangunan Gedung Puskesmas	Kelurahan Bencongan	1 Paket	500.000.00	Dinas Kesehatan
7	Meningkatkan Pembangunan SDM Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengadaan lahan SMPN di Kelurahan Bojong Nangka	Tersedianya Lahan Untuk Pembangunan SMPN	Kelurahan Bojong Nangka	6000 m	10.000.000.00	Dinas Perumahan, Pemukimandan Pemakaman
8	Meningkatkan Pembangunan SDM Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembuatan Selasar Penghubung Antara Ruang Belajar SMPN 1 Kelapa Dua	Meningkatnya Kualitas Gedung Sekolah	Kelurahan Bencongan	1 Paket	400.000.00	Dinas Pendidikan
9	Meningkatkan Pembangunan SDM Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penerapan Zona Selamat Sekolah (ZoSS) SMPN 1 Kelapa Dua	MeningkatnyaKeselamatan Anak Sekolah	Kelurahan Bencongan	1 Paket	300.000.00	Dinas Pendidikan
10	Meningkatkan Pembangunan SDM Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengadaan Mebeler SDN Cihuni II Desa Curug Sangereng	Tersedianya Mebeler Sekolah	SDN Cihuni II Desa Curug Sangereng	1 Paket	250.000.00	Dinas Pendidikan
11	Meningkatkan Pembangunan SDM Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Musolah SDN Bencongan 1	Tersedianya Bangunan Mushola Di Sekolah	Kp. Dadap Kelurahan Bencongan Indah	1 Paket	250.000.00	Dinas Pendidikan
12	Meningkatkan Pembangunan SDM Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Rehabilitasi Gedung Sekolah SMPN 2 Kelapa Dua	MeningkatnyaKualitas Gedung Sekolah	Kelurahan Kelapa Dua	1 Paket	400.000.00	Dinas Pendidikan
13	Meningkatkan Pembangunan SDM Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Keluarga Berisiko Stunting	Tersedianya Pemberian Makanan Tambahan Bagi Keluarga Berisiko Stunting	Kelurahan Kelapa Dua	6.875 Keluarga	150.000.00	Kecamatan Kelapa Dua
14	Meningkatkan Pembangunan SDM Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Keluarga Berisiko Stunting	Tersedianya Pemberian Makanan Tambahan Bagi Keluarga Berisiko Stunting	Kelurahan Pakulonan Barat	2.437 Keluarga	100.000.00	Kecamatan Kelapa Dua
15	Meningkatkan Pembangunan SDM Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Keluarga Berisiko Stunting	Tersedianya Pemberian Makanan Tambahan Bagi Keluarga Berisiko Stunting	Kelurahan Bojong Nangka	10.042 Keluarga	200.000.00	Kecamatan Kelapa Dua
16	Meningkatkan Pembangunan SDM Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Keluarga Berisiko Stunting	Tersedianya Pemberian Makanan Tambahan Bagi Keluarga Berisiko Stunting	Kelurahan Bencongan	8.140 Keluarga	200.000.00	Kecamatan Kelapa Dua
17	Meningkatkan Pembangunan SDM Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Keluarga Berisiko Stunting	Tersedianya Pemberian Makanan Tambahan Bagi Keluarga Berisiko Stunting	Kelurahan Bencongan Indah	2.113 Keluarga	100.000.00	Kecamatan Kelapa Dua
18	Meningkatkan Pembangunan SDM Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Keluarga Berisiko Stunting	Meningkatnya Kualitas Rumah Bagi Keluarga Berisiko Stunting	Kelurahan Kelapa Dua	6 Rumah	300.000.00	Dinas Perumahan, Permukimandan Pemakaman

KOMPOSISI EKONOMI							
1	Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Yang Berdaya Saing	Pengembangan Budidaya Ikan Sebagai Nilai Ekonomis Dan Kesehatan (Penanganan Keluarga Berisiko Stunting)	Terfasilitasi Pengembangan Budidaya Ikan	Kelurahan Bencongan Indah	1 Paket	200.000.00	Dinas Perikanan
2	Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Yang Berdaya Saing	Pengembangan Budidaya Ikan Sebagai Nilai Ekonomis Dan Kesehatan (Penanganan Keluarga Berisiko Stunting)	Terfasilitasi Pengembangan Budidaya Ikan	Kelurahan Bojong Nangka	1 Paket	200.000.00	Dinas Perikanan
3	Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Yang Berdaya Saing	Pembinaan Peningkatan Pengemasan Produk UMKM Melalui Pengembangan Rumah Kemasan Produk UMKM	Meningkatnya Kualitas Pengemasan Produk UMKM	Kelurahan Kelapa Dua	60 UMKM	200.000.00	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
4	Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Yang Berdaya Saing	Fasilitasi Legalisasi Produk Produk UMKM	Terfasilitasi Legalitas Produk UMKM	Kelurahan Pakulonan Barat	60 UMKM	200.000.00	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
5	Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Yang Berdaya Saing	Pembinaan Peningkatan Pemasaran Produk UMKM Melalui Pengembangan E- Comerce	Meningkatnya Penjualan Produk UMKM	Kelurahan Bojong Nangka	60 UMKM	200.000.00	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
6	Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Yang Berdaya Saing	Gerai UMKM / Pojok UMKM Kecamatan Kelapa Dua	Tersedianya Gerai Sebagai Media Promosi Produk UMKM	Area Kawasan Stadion Mini Kelurahan Bencongan	1 Paket	450.000.00	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
7	Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Yang Berdaya Saing	Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Bantuan Penyediaan Sarana Gereobak/Booth Tenant	Meningkatnya Perekonomian Masyarakat	Kelurahan Bencongan	1 Paket	400.000.00	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
8	Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Yang Berdaya Saing	Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Bantuan Penyediaan Sarana Gereobak/Booth Tenant	Meningkatnya Perekonomian Masyarakat	Kelurahan Bojong Nangka	1 Paket	400.000.00	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
9	Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Yang Berdaya Saing	Mengatasi Pengangguran Melalui Pembentukan Kelompok Pemberdayaan Perekonomian Masyarakat	Menurunnya Tingkat Penggaguran Di Kecamatan	Desa Curug Sangereng	4 Kelompok	150.000.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
10	Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Yang Berdaya Saing	Peningkatan Kesejahteraan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Melalui Pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Kelurahan Pakulonan Barat	4 Kelompok	200.000.00	Dinas Sosial
11	Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Yang Berdaya Saing	Pemberdayaan Perekonomian Masyarakat Bagi Penyandang Disbilitas Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	MeningkatnyaKesejahteraan Masyarakat	Kelurahan Bojong Nangka	4 Kelompok	200.000.00	Dinas Sosial
12	Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Yang Berdaya Saing	Kampung Tematik "KAMPUNG SENTRA BATIK"	Meningkatnya Perekonomian Masyarakat	Kelurahan Kelapa Dua	1 Paket	200.000.00	Kecamatan Kelapa Dua
13	Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Yang Berdaya Saing	Kampung Tematik "KAMPUNG RELIGIUS"	Meningkatnya Perekonomian Masyarakat	Kelurahan Pakulonan Barat	1 Paket	200.000.00	Kecamatan Kelapa Dua
14	Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Yang Berdaya Saing	Penataan Objek Wisata Situ Kelapa Dua	Meningkatnya Perekonomian Masyarakat	Kelurahan Kelapa Dua	1 Paket	500.000.00	Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
15	Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Yang Berdaya Saing	Penataan Destinasi Kuliner Pembangunan Food Court untuk UMKM	Terfasilitasi Sarana Dan Prasarana Penunjang UMKM	Area Kawasan Stadion Mini Kelurahan Bencongan	1 Paket	500.000.00	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
16	Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Yang Berdaya Saing	Penataan Destinasi Kuliner Pembangunan Food Court untuk UMKM	Meningkatnya Perekonomian Masyarakat	Perumahan Harapan Kita Kelurahan Bencongan Indah	1 Paket	500.000.00	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
17	Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Yang Berdaya Saing	Penataan Destinasi Kuliner Pembangunan Food Court untuk UMKM RW. 006	Meningkatnya Perekonomian Masyarakat	Kelurahan Pakulonan Barat	1 Paket	300.000.00	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
18	Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Yang Berdaya Saing	Fasilitasi Pembinaan Penguatan Koperasi	MeningkatnyaKualitas Pengelolaan Koperasi	Kelurahan Pakulonan Barat	1 Paket	100.000.00	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro

KOMPOSISI LAIN LAIN							
1	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang Terpadu	Rehab Total Gedung Kantor Kecamatan Kelapa Dua	MeningkatnyaKualitas Gedung Kantor Kecamatan	Kecamatan Kelapa Dua	1 Paket	3.000.000.000	Dinas Tata Ruang dan Bangunan
2	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang Terpadu	Penambahan Ruang Gedung Kantor Kecamatan Kelapa Dua	Tersedianya Ruang Gedung Kantor	Kecamatan Kelapa Dua	1 Paket	3.000.000.000	Dinas Tata Ruang dan Bangunan
3	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang Terpadu	Pembangunan Gedung Bersama Kepemudaan (Pramuka, Karang Taruna, KNPI, Paskibra)	Tersedianya Gedung Kepemudaan	Area Kawasan Stadion Mini Kelurahan Bencongan	1 Paket	1.500.000.000	Dinas Tata Ruang dan Bangunan
4	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang Terpadu	Pembangunan Gedung Serba Guna (GSG)	Tersedianya Gedung Serba Guna (GSG)	Area Kawasan Stadion Mini Kelurahan Bencongan	1 Paket	2.000.000.000	Dinas Tata Ruang dan Bangunan
5	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang Terpadu	Pembangunan Gapura Selamat Datang Di Kabupaten Tangerang	Terbangunnya Gapura Selamat Datang	Jembatan Tol Islamic Kelurahan Kelapa Dua	1 Paket	1.000.000.000	Dinas Perumahan, Permukimandan Pemakaman
6	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang Terpadu	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Kelurahan Pakulonan Barat (Rehab Tembok Pagar)	MeningkatnyaKualitas Pagar Gedung Kantor	Kel. Pakulonan Barat	1 Paket	300.000.000	Dinas Tata Ruang dan Bangunan
7	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang Terpadu	Pembuatan Tandon Air Di Stadion Sport Center	Tersedianya Tandon Air	Sport Center Kelurahan Bojong Nangka	300 M	500.000.000	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
8	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang Terpadu	Penerangan Jalan Umum (PJU) Kawasan Luar Dan Dalam Stadion Mini	Meningkatnya Kualitas Penerangan Stadion Mini	Area Kawasan Stadion Mini Kelurahan Bencongan	30 Titik	450.000.000	Dinas Perhubungan
9	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang Terpadu	Penataan Taman Ruang Terbuka Hijau Area Stadion Mini	MeningkatnyaKualitas Ruang Terbuka	Area Kawasan Stadion Mini Kelurahan Bencongan	1 Paket	400.000.000	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan
10	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang Terpadu	Pembangunan Lapangan Olahraga Basket, Volly Dan Futsal	Tersedianya Sarana Lapangan Olahraga	Area Kawasan Stadion Mini Kelurahan Bencongan	1 Paket	2.000.000.000	Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
11	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang Terpadu	Penataan Lapangan Olahraga Mini Soccer	MeningkatnyaKualitas Lapangan Olahraga	Perum Dasana Indah Blok U Kelurahan Bojong Nangka	1 Paket	600.000.000	Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
12	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang Terpadu	Pembangunan Taman Bermain Ramah Anak RW. 006	Meningkatnya Kualitas Lapangan Olahraga	Kelurahan Pakulonan Barat	1 Paket	300.000.000	Kecamatan Kelapa Dua
13	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang Terpadu	Normalisasi dan Perbaikan Saluran Air	MeningkatnyaKualitas Saluran Air	Jl. Empu Tantular Raya Rw, 02, Rw, 03 & Rw. 04 Kelurahan Bencongan Indah	1000 m2	1.000.000.000	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
14	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang Terpadu	Lanjutan Peningkatan Jalan Betonisasi	Meningkatnya Kualitas Jalan	Jl. Borobudur Raya Kel. Bencongan	1 Paket	3.000.000.000	Dinas Perumahan, Permukimandan Pemakaman

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

A. Telaahan Terhadap Kebijakan Daerah

Tahun 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan RPJPN (Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Nasional) Tahun 2025-2045 yang merupakan momentum penting dalam menentukan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan dan berorientasi pada pencapaian Visi Indonesia Emas 2045 (Restuardy Daud, Dirjen Bina Pembangunan Daerah, Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia). Dalam Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekbang) Tahun 2024 yang diselenggarakan pada tanggal 26 Februari 2024 di Surabaya Dirjen Bina Pembangunan Daerah menyampaikan enam arahan Menteri Dalam Negeri yang meliputi :

a. Perencanaan yang berintegritas dan memuliakan efisensi;
b. Pembangunan Berorientasi Hasil;
c. Tingkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk kemandirian fiskal;
d. Mewujudkan pemerintahan yang Ramah Investasi;
e. Pendidikan dan Kesehatan Jalan Menuju Kesejahteraan;
f. Pelayanan Publiik untuk Mewujudkan Keadilan.

Arahan tersebut diharapkan dapat menjadi pedoman bagi para pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan dan program pembangunan yang berdampak positif dan berkelanjutan bagi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyrakat.

B. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Kelapa Dua

Dalam rangka mewujudkan Misi Kabupaten Tangerang, maka perlu dijabarkan kembali ke dalam tujuan dan sasaran strategis yang lebih operasionalyang dituangkan dalam Renja Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang Tahun 2025, yaitu:

1. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Penetapan Tujuan dalam Rencana Kerja didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama pada Kecamatan Kelapa Dua. Adapun rumusan tujuan di dalam Rencana Kerja Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang Tahun 2025 adalah :

1.1 Meningkatkan kualitas pelayanan publik kecamatan

2. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/ dihasilkan secara nyata oleh Kecamatan Kelapa Dua dalam jangka waktu Satu tahun mendatang. Sesuai dengan tujuan yang telah diuraikan di atas, maka sasaran capaian target yang akan dituangkan ke dalam rencana kerja Kecamatan Kelapa Dua Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

2.1 Terpenuhinya pelayanan publik sesuai dengan standar kecamatan

2.2 Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja

Tujuan, sasaran dan indikator kinerja sasaran Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang adalah sebagai berikut:

Tabel 6
Tujuan, sasaran dan indikator kinerja sasaran Kecamatan Kelapa Dua

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Definisi Operasional
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Meningkatkan kualitas pelayananpublik kecamatan	Terselenggaranya Pelayanan Publik Kecamatan yang efisien, transparan, dan sesuai dengan SPM	Nilai survey kepuasan masyarakat (SKM)	Nilai survey kepuasan masyarakat (SKM)

Penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kelapa Dua adalah sebagai berikut :

Tabel 7
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kelapa Dua

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal Kinerja		Target			Kondisi Akhir
			2022 *	2023**	2024	2025	2026	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1	Nilai survey kepuasan masyarakat (SKM)	Nilai	86	88.2	88.8	89	89.2	89.2

C. Progam dan Kegiatan

Sebagai perwujudan dalam mendukung prioritas pembangunan Kabupaten Tangerang Tahun 2025, prioritas pembangunan daerah yang terkait dengan kegiatan operasional Kecamatan Kelapa Dua adalah Peningkatan kualitas perencanaan melalui peningkatan profesionalisme aparatur Kecamatan Kelapa Dua dalam pembangunan dan peningkatan kualitas dokumen perencanaan yang dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024, pelaksanaan kinerja Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang Tahun 2024 ditunjang dengan Belanja Tidak Langsung yang anggarannya diperuntukan untuk Belanja Pegawai dan Belanja Langsung yang terdiri dari Belanja Langsung Urusan SKPD dan Belanja Langsung Urusan Wajib dan Pilihan (Program), denganruang lingkup kegiatannya.

Rancangan Rencana kerja untuk tahun 2025, program dan kegiatan yang ada di Perangkat Daerah Kantor Kecamatan Kelapa Dua pada dasarnya mengacu pada Permendagri No 90 tahun 2019 dan penambahan disesuaikan dengan tuntuntan perkembangan jaman, hal ini disebabkan program yang dilaksanakan telah sesuai dengan rencana kerja yang disusun dalam Dukumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Adapun penjelasan program dan kegiatan untuk Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut
:

1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan programdan kegiatan adalah :
   a. Program dan Kegiatan Rutin setiap tahun
   b. Program dan Kegiatan yang bersifat mendesak untuk dilaksanakan khususnya untuk peningkatan pelayanan masyarakat.
   c. Program dan Kegiatan dibidang pembangunan infrastruktur, perekonomian masyarakat, penanganan kemiskinan ekstream dan stunting, peningkatan SDM dan kualitas tata Kelola pemerintahan.

2. Uraian garis besar rekapitulasi program dan kegiatan untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah dalam Tahun 2025 sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
   b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja danIkhtisar Realisasi Kinerja SKPD
   c. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD

1.3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
   a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
   b. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

1.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah
   a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
   b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
   d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
   e. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   f. Fasilitasi Kunjungan Tamu

g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

1.5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

1.6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANANPUBLIK

2.1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
a. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

2.2 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
a. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum

3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

2.1 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
b. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

2.2 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
b. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
c. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

3. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

3.1 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

a. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perndang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

4. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

4.1 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

a. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintaha Desa

5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

5.1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

a. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
b. Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
c. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

D. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BERDASARKAN HASIL PENGERJAAN

Rumusan rencana program dan kegiatan untuk tahun 2025 dengan mengacu pada Rancangan Akhir RKPD serta pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Kelapa Dua secara keseluruhan pada tahun 2025 terdiri dari 5 program untuk kecamatan dan 3 kelurahan , 13 kegiatan dan 33 sub kegiatan, untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada Tabel di bawah ini :

aa

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		KECAMATAN KELAPA DUA							**36.403.029.700,00**	**47.214.475.059,00**	**47.482.764.530,00**	**11.079.734.830,00**							**33.006.999.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**36.403.029.700,00**	**47.214.475.059,00**	**47.482.764.530,00**	**11.079.734.830,00**							**33.006.999.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**36.403.029.700,00**	**47.214.475.059,00**	**47.482.764.530,00**	**11.079.734.830,00**							**33.006.999.000,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan**				**100 Persen**	**100 Persen**	**21.327.559.003,00**	**21.238.795.194,00**	**22.120.559.865,00**	**-606.520.557,00**							**20.721.038.446,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah kecamatan Kelapa Dua*				100 Persen	100 Persen	332.992.000,00	334.520.000,00	212.522.000,00	-120.470.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia	Pegawai Kecamatan Kelapa Dua		343.000.000,00	KECAMATAN KELAPA DUA
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		

			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	162.252.000,00	129.372.000,00	72.744.000,00	-89.508.000,00	Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia			170.000.000,00	KECAMATAN KELAPA DUA
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	4 Laporan	53.620.000,00	53.620.000,00	39.090.000,00	-14.530.000,00	Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			55.000.000,00	KECAMATAN KELAPA DUA
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	117.120.000,00	151.528.000,00	100.688.000,00	-16.432.000,00	Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			118.000.000,00	KECAMATAN KELAPA DUA

	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah kecamatan Kelapa Dua*				100 Persen	100 Persen	12.746.498.126,00	12.849.317.383,00	13.574.788.754,00	828.290.628,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Pegawai Kecamatan Kelapa Dua		12.850.000.000,00	KECAMATAN KELAPA DUA
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				51 Orang/bulan	51 Orang/bulan	12.701.870.126,00	12.804.689.383,00	13.542.442.754,00	840.572.628,00	Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			12.800.000.000,00	KECAMATAN KELAPA DUA
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				4 Laporan	4 Laporan	44.628.000,00	44.628.000,00	32.346.000,00	-12.282.000,00	Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			50.000.000,00	KECAMATAN KELAPA DUA

	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian kecamatan Kelapa Dua*				100 Persen	100 Persen	317.374.600,00	327.628.000,00	322.536.000,00	5.161.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Pegawai Kecamatan Kelapa Dua		335.678.800,00	KECAMATAN KELAPA DUA
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				150 Paket	150 Paket	103.425.000,00	110.390.000,00	110.390.000,00	6.965.000,00	Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			105.000.000,00	KECAMATAN KELAPA DUA
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				25 Orang	25 Orang	113.593.600,00	107.764.000,00	105.534.000,00	-8.059.600,00	Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			115.000.000,00	KECAMATAN KELAPA DUA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan administrasi umum kecamatan Kelapa Dua*				100 Persen	100 Persen	1.904.905.900,00	1.536.289.670,00	1.567.300.970,00	-337.604.930,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Pegawai Kecamatan Kelapa Dua		2.014.581.046,00	KECAMATAN KELAPA DUA
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				30 Paket	30 Paket	97.325.000,00	100.382.000,00	100.382.000,00	3.057.000,00	Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			95.000.000,00	KECAMATAN KELAPA DUA
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				120 Paket	120 Paket	350.273.000,00	111.561.000,00	261.561.000,00	-88.712.000,00	Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			400.000.000,00	KECAMATAN KELAPA DUA
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				120 Paket	120 Paket	72.900.000,00	97.697.000,00	97.697.000,00	24.797.000,00	Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			75.000.000,00	KECAMATAN KELAPA DUA
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				60 Paket	60 Paket	83.294.000,00	81.806.800,00	81.806.800,00	-1.487.200,00	Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			85.000.000,00	KECAMATAN KELAPA DUA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		

			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				30 Paket	30 Paket	84.826.000,00	97.682.000,00	81.291.400,00	-3.534.600,00	Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			87.000.000,00	KECAMATAN KELAPA DUA

	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				6732 Laporan	6732 Laporan	104.088.000,00	108.465.600,00	89.817.600,00	-14.270.400,00	Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			103.000.000,00	KECAMATAN KELAPA DUA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	99.700.000,00	110.120.000,00	55.045.000,00	-44.655.000,00	Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			102.000.000,00	KECAMATAN KELAPA DUA

	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pemenuhan jasa penunjang kecamatan Kelapa Dua*				100 Persen	100 Persen	3.173.901.477,00	3.303.487.205,00	3.555.859.205,00	381.957.728,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Pegawai Kecamatan Kelapa Dua		1.928.272.600,00	KECAMATAN KELAPA DUA
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				72 Laporan	72 Laporan	363.169.560,00	363.169.560,00	363.169.560,00	0,00	Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			365.000.000,00	KECAMATAN KELAPA DUA
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 20	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				

										25										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				108 Laporan	108 Laporan	1.106.799.000,00	1.169.415.568,00	1.421.787.568,00	314.988.568,00	Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeluduan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			115.799.000,00	KECAMATAN KELAPA DUA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Persentase pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah kecamatan Kelapa Dua*				100 Persen	100 Persen 1 Unit	2.851.886.900,00	2.887.552.936,00	2.887.552.936,00	35.666.036,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeluduan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Pegawai Kecamatan Kelapa Dua		3.249.506.000,00	KECAMATAN KELAPA DUA
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				126 Unit	126 Unit	352.947.600,00	391.573.272,00	391.573.272,00	38.625.672,00	Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pembera	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan			355.000.000,00	KECAMATAN KELAPA DUA

															ntasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				120 Unit	120 Unit	157.500.000,00	156.884.000,00	156.884.000,00	-616.000,00	Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			160.000.000,00	KECAMATAN KELAPA DUA
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				6 Unit	6 Unit	581.836.500,00	820.830.534,00	820.830.534,00	238.994.034,00	Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			588.000.000,00	KECAMATAN KELAPA DUA
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau				6 Unit	6 Unit	599.940.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00	60.000,00	Kab. Tangerang, Kelapa Dua,	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata			700.000.000,00	KECAMATAN KELAPA

			Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi										Semua Kel/Desa	(PAD)	dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan	Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik				DUA

															penyeludupan.				
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar Persentase pemeliharaan Fasilitas umum yang terpelihara**	**-**	**100 91,7 Persen Persen**	**5.142.310.500,00**	**14.917.451.000,00**	**15.111.944.000,00**	**132.625.500,00**						**5.274.936.000,00**	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar Kecamatan Kelapa Dua*	100 Persen	100 Persen	4.464.385.500,00	4.528.451.000,00	4.452.944.000,00	-11.441.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Masyarakat	4.574.936.000,00	KECAMATAN KELAPA DUA
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	360 Laporan	360 Laporan	299.961.500,00	219.705.000,00	163.362.000,00	-136.599.500,00	Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba,	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola		300.000.000,00	KECAMATAN KELAPA DUA

												judi, dan penyeludupan.	Pemerintahan yang Baik			
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	*Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik Kecamatan Kelapa Dua*	100 Persen	100 Persen	677.925.000,00	10.389.000.000,00	10.659.000.000,00	9.981.075.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Masyarakat	700.000.000,00	KECAMATAN KELAPA DUA
	7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum														
			Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	5 Dokumen	5 Dokumen	677.925.000,00	10.389.000.000,00	10.659.000.000,00	9.981.075.000,00	Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik		700.000.000,00	KECAMATAN KELAPA DUA
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase pemenuhan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan**	**-**	**100 Persen**	**8.974.030.597,00**	**10.096.529.865,00**	**9.480.432.265,00**	**-2.256.695.243,00**						**6.717.335.354,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan Kecamatan Kelapa Dua*				100 Persen	100 Persen	2.559.916.000,00	2.032.772.200,00	1.815.842.200,00	-744.073.800,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Meningkatkan Perekonomian Masyarakat	Masyarakat		0,00	KECAMATAN KELAPA DUA
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan				6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	59.994.000,00	67.572.400,00	67.572.400,00	7.578.400,00	Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan	Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Meningkatkan			0,00	KECAMATAN KELAPA DUA

			Pembangunan di Desa												ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Perekonomian Masyarakat				
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				15 Laporan	15 Laporan	2.499.922.000,00	1.965.199.800,00	1.748.269.800,00	-751.652.200,00	Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Meningkatkan Perekonomian Masyarakat			0,00	KECAMATAN KELAPA DUA
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase penurunan gangguan trantibum yang ditindaklanjuti**				**10 Persen**	**10 Persen**	**382.289.600,00**	**451.161.200,00**	**350.187.600,00**	**-88.600.400,00**							**293.689.200,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti kecamatan Kelapa Dua*				100 Persen	100 Persen	382.289.600,00	451.161.200,00	350.187.600,00	-32.102.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Masyarakat		293.689.200,00	KECAMATAN KELAPA DUA

														masyarakat yang adil dan makmur.					
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																	
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				10 Laporan	10 Laporan	99.522.000,00	126.740.000,00	100.680.000,00	1.158.000,00	Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			0,00	KECAMATAN KELAPA DUA
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Prosentase Program Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum**				**100 Persen**	**100 Persen**	**447.876.000,00**	**417.242.800,00**	**349.380.800,00**	**-447.876.000,00**							**0,00**	

	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Jumlah Orang yang mengikuti pembinaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah*	100 Persen	100 Persen	447.876.000,00	417.242.800,00	349.380.800,00	-98.495.200,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Masyarakat	0,00	KECAMATAN KELAPA DUA

	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	25 Orang	25 Orang	200.016.000,00	233.022.800,00	203.200.800,00	3.184.800,00	Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik		0,00	KECAMATAN KELAPA DUA
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	25 Orang	25 Orang	74.412.000,00	67.960.000,00	56.910.000,00	-17.502.000,00	Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik		0,00	KECAMATAN KELAPA DUA
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan													

			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	3 Dokumen	3 Dokumen	173.448.000,00	116.260.000,00	89.270.000,00	-84.178.000,00	Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik		0,00	KECAMATAN KELAPA DUA
6.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase pemenuhan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Persentase pemenuhan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**	**100 100 Nilai Persen**	**100 100 Nilai Persen**	**128.964.000,00**	**93.295.000,00**	**70.260.000,00**	**-128.964.000,00**						**0,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Prosentase Desa dengan Laporan Keuangan Baik*	100 Persen	100 Persen	128.964.000,00	93.295.000,00	70.260.000,00	-58.704.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Masyarakat	0,00	KECAMATAN KELAPA DUA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				5 Dokumen	5 Dokumen	128.964.000,00	93.295.000,00	70.260.000,00	-58.704.000,00	Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			0,00	KECAMATAN KELAPA DUA
		KELURAHAN KELAPA DUA							**36.403.029.700,00**	**47.214.475.059,00**	**47.482.764.530,00**	**11.079.734.830,00**							**33.006.999.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**36.403.029.700,00**	**47.214.475.059,00**	**47.482.764.530,00**	**11.079.734.830,00**							**33.006.999.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**36.403.029.700,00**	**47.214.475.059,00**	**47.482.764.530,00**	**11.079.734.830,00**							**33.006.999.000,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan**				**100 Persen**	**100 Persen**	**21.327.559.003,00**	**21.238.795.194,00**	**22.120.559.865,00**	**-606.520.557,00**							**20.721.038.446,00**	

	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian kecamatan Kelapa Dua*				100 Persen	100 Persen	317.374.600,00	327.628.000,00	322.536.000,00	5.161.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Pegawai Kelurahan Kelapa Dua		335.678.800,00	KECAMATAN KELAPA DUA
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				7 Paket	7 Paket	25.326.000,00	16.434.000,00	16.434.000,00	-8.892.000,00	Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Kelapa Dua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			26.000.000,00	KECAMATAN KELAPA DUA
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan administrasi umum kecamatan Kelapa Dua*				100 Persen	100 Persen	1.904.905.900,00	1.536.289.670,00	1.567.300.970,00	-337.604.930,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba,	- -	Pegawai Kelurahan Kelapa Dua		2.014.581.046,00	KECAMATAN KELAPA DUA

														judi, dan penyeludupan.					
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	11.701.000,00	11.690.000,00	11.690.000,00	-11.000,00	Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Kelapa Dua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			12.000.000,00	KECAMATAN KELAPA DUA
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	

		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	98.010.000,00	77.949.700,00	77.949.700,00	-20.060.300,00	Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Kelapa Dua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			99.000.000,00	KECAMATAN KELAPA DUA
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	12.721.400,00	12.726.700,00	12.402.700,00	-318.700,00	Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Kelapa Dua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			13.000.000,00	KECAMATAN KELAPA DUA

														penyeludupan.					
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	20.421.700,00	19.195.000,00	18.763.000,00	-1.658.700,00	Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Kelapa Dua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			21.000.000,00	KECAMATAN KELAPA DUA
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	14.634.000,00	14.634.000,00	10.962.000,00	-3.672.000,00	Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Kelapa Dua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			15.000.000,00	KECAMATAN KELAPA DUA
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	68.796.000,00	68.236.800,00	68.236.800,00	-559.200,00	Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Kelapa Dua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			67.000.000,00	KECAMATAN KELAPA DUA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pemenuhan jasa penunjang kecamatan Kelapa Dua*				100 Persen	100 Persen	3.173.901.477,00	3.303.487.205,00	3.555.859.205,00	381.957.728,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Pegawai Kelurahan Kelapa Dua		1.928.272.600,00	KECAMATAN KELAPA DUA
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber				1 Laporan	1 Laporan	59.999.317,00	59.999.317,00	59.999.317,00	0,00	Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Kelapa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola			70.000.000,00	KECAMATAN KELAPA DUA

			Daya Air dan Listrik yang Disediakan									Dua		birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik				
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	269.430.000,00	281.430.000,00	281.430.000,00	12.000.000,00	Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Kelapa Dua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			274.000.000,00	KECAMATAN KELAPA DUA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Persentase pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah kecamatan Kelapa Dua*				100 Persen	100 Persen 1 Unit	2.851.886.900,00	2.887.552.936,00	2.887.552.936,00	35.666.036,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Pegawai Kelurahan Kelapa Dua		3.249.506.000,00	KECAMATAN KELAPA DUA
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
			Jumlah				4 Unit	4 Unit	7.500.000,	26.954.160	26.954.160	19.454.160,00	Kab.	PENDA	Memper	Meningka			7.400.000,00	KECA

			Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara						00	,00	,00		Tangerang, Kelapa Dua, Kelapa Dua	PATAN ASLI DAERAH (PAD)	kuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	tkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik				MATAN KELAPA DUA
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	302.610.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-202.610.000,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi,	- -			400.000.000,00	KECAMATAN KELAPA DUA

												narkoba, judi, dan penyeludupan.					
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar Persentase pemeliharaan Fasilitas umum yang terpelihara**	**100 91,5 Persen Persen**	**100 91,5 Persen Persen**	**5.142.310.500,00**	**14.917.451.000,00**	**15.111.944.000,00**	**132.625.500,00**						**5.274.936.000,00**	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai*	100 Persen	100 Persen	4.464.385.500,00	4.528.451.000,00	4.452.944.000,00	-11.441.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintaha	Masyarakat	4.574.936.000,00	KECAMATAN KELAPA DUA

			dengan standar Kecamatan Kelapa Dua									memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	n yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	750.048.000,00	763.380.000,00	763.380.000,00	13.332.000,00	Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Kelapa Dua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik		800.000.000,00	KECAMATAN KELAPA DUA
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase pemenuhan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan**	**100 Persen**	**100 Persen**	**8.974.030.597,00**	**10.096.529.865,00**	**9.480.432.265,00**	**-2.256.695.243,00**						**6.717.335.354,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase pemenuhan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan*	100 Persen	100 Persen	6.414.114.597,00	8.063.757.665,00	7.664.590.065,00	1.250.475.468,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Meningkatkan Perekonomian Masyarakat	Masyarakat	6.717.335.354,00	KECAMATAN KELAPA DUA
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	14.850.000,00	24.860.600,00	24.860.600,00	10.010.600,00	Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Kelapa Dua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Meningkatkan Perekonomian Masyarakat		15.000.000,00	KECAMATAN KELAPA DUA

	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	5 Unit	1.050.339.947,00	1.250.000.000,00	1.250.000.000,00	199.660.053,00	Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Kelapa Dua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Meningkatkan Perekonomian Masyarakat		1.050.000.000,00	KECAMATAN KELAPA DUA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan													

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				6 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	650.083.600,00	754.659.900,00	648.895.900,00	-1.187.700,00	Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Kelapa Dua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Meningkatkan Perekonomian Masyarakat			700.000.000,00	KECAMATAN KELAPA DUA
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase penurunan gangguan trantibum yang ditindaklanjuti**				**10 Persen**	**10 Persen**	**382.289.600,00**	**451.161.200,00**	**350.187.600,00**	**-88.600.400,00**							**293.689.200,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyele	*Prosentase gangguan trantibum*				100 Persen	100 Persen	382.289.600,00	451.161.200,00	350.187.600,00	-32.102.000,00			Memperkuat penyelarasan	Meningkatkan Penyelenggaraan	Masyarakat		293.689.200,00	KECAMATAN KEL

		nggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*yang ditindaklanjuti kecamatan Kelapa Dua*											kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik				APA DUA
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																	
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	58.590.000,00	64.409.200,00	48.949.200,00	-9.640.800,00	Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Kelapa Dua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			59.000.000,00	KECAMATAN KELAPA DUA

		KELURAHAN PAKULONAN BARAT							**36.403.029.700,00**	**47.214.475.059,00**	**47.482.764.530,00**	**11.079.734.830,00**							**33.006.999.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**36.403.029.700,00**	**47.214.475.059,00**	**47.482.764.530,00**	**11.079.734.830,00**							**33.006.999.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**36.403.029.700,00**	**47.214.475.059,00**	**47.482.764.530,00**	**11.079.734.830,00**							**33.006.999.000,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan**				**100 Persen**	**100 Persen**	**21.327.559.003,00**	**21.238.795.194,00**	**22.120.559.865,00**	**-606.520.557,00**							**20.721.038.446,00**	
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian kecamatan Kelapa Dua*				100 Persen	100 Persen	317.374.600,00	327.628.000,00	322.536.000,00	5.161.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Pegawai Kelurahan Pakulonan Barat		335.678.800,00	KECAMATAN KELAPA DUA
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				7 Paket	7 Paket	25.000.000,00	25.960.000,00	25.960.000,00	960.000,00	Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Pakulonan Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludup	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola			26.000.000,00	KECAMATAN KELAPA DUA

															an.	Pemerintahan yang Baik				
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan administrasi umum kecamatan Kelapa Dua*	100 Persen	100 Persen	1.904.905.900,00	1.536.289.670,00	1.567.300.970,00	-337.604.930,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Pegawai Kelurahan Pakulonan Barat	2.014.581.046,00	KECAMATAN KELAPA DUA
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	8.780.000,00	8.780.000,00	-1.220.000,00	Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Pakulonan Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik		11.000.000,00	KECAMATAN KELAPA DUA
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	150.000.000,00	70.157.800,00	70.157.800,00	-79.842.200,00	Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Pakulonan Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik		151.000.000,00	KECAMATAN KELAPA DUA
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																			
		Jumlah Paket	1 Paket	1 Paket	55.000.000,00	37.204.100,00	37.204.100,00	-17.795.900,00	Kab. Tangeran	PENDAPATAN ASLI	Memperkuat reformasi	Meningkatkan Penyelenggaraa		56.000.000,00	KECAMATAN KELAPA

		Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan							g, Kelapa Dua, Pakulonan Barat	DAERAH (PAD)	politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	n Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			DUA
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	35.000.000,00	21.692.000,00	21.692.000,00	-13.308.000,00	Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Pakulonan Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik		36.000.000,00	KECAMATAN KELAPA DUA
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengganda an yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	20.000.000,00	26.722.000,00	18.377.000,00	-1.623.000,00	Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Pakulonan Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			21.000.000,00	KECAMATAN KELAPA DUA
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjunga				1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	13.123.200,00	13.123.200,00	-6.876.800,00	Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Pakulonan Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang			21.000.000,00	KECAMATAN KELAPA DUA

			n Tam u											memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik				
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pemenuhan jasa penunjang kecamatan Kelapa Dua*				100 Persen	100 Persen	3.173.901.477,00	3.303.487.205,00	3.555.859.205,00	381.957.728,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Pegawai Kelurahan Pakulonan Barat		1.928.272.600,00	KECAMATAN KELAPA DUA
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	75.000.000,00	69.469.560,00	69.469.560,00	-5.530.440,00	Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Pakulonan Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			76.000.000,00	KECAMATAN KELAPA DUA
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
			Jumla				1	1	209.495.20	206.944.00	206.944.00	-2.551.200,00	Kab.	PENDAP	Memperk	Meningkat			211.000.000,0	KECA

			h Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				Laporan	Laporan	0,00	0,00	0,00		Tangerang, Kelapa Dua, Pakulonan Barat	ATAN ASLI DAERAH (PAD)	uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelud upan.	kan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			0	MATAN KELAPA DUA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah kecamatan Kelapa Dua*				100 Persen	100 Persen	2.851.886.900,00	2.887.552.936,00	2.887.552.936,00	35.666.036,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelud upan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Pegawai Kelurahan Pakulonan Barat		3.249.506.000,00	KECAMATAN KELAPA DUA
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	

			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	2 Unit	5.000.000,00	22.394.160,00	22.394.160,00	17.394.160,00	Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Pakulonan Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	6.000.000,00	KECAMATAN KELAPA DUA

												penyeludupan.			
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit	15.000.000,00	11.800.000,00	11.800.000,00	-3.200.000,00	Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Pakulonan Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	16.000.000,00	KECAMATAN KELAPA DUA
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	40.000.000,00	Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Pakulonan Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	51.000.000,00	KECAMATAN KELAPA DUA
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Pakulonan Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	51.000.000,00	KECAMATAN KELAPA DUA
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN**	**Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar**	**100 91,5 Persen**	**100 91,5 Persen**	**5.142.310.500,00**	**14.917.451.000,00**	**15.111.944.000,00**	**132.625.500,00**					**5.274.936.000,00**	

		DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemeliharaan Fasilitas umum yang terpelihara	Persen	Persen														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar Kecamatan Kelapa Dua*				100 Persen	100 Persen	4.464.385.500,00	4.528.451.000,00	4.452.944.000,00	-11.441.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Masyarakat		4.574.936.000,00	KECAMATAN KELAPA DUA
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkat				1 Laporan	1 Laporan	759.040.000,00	785.646.000,00	776.916.000,00	17.876.000,00	Kab. Tangerang,	PENDAPATAN ASLI	Memperkuat reformas	Meningkatkan Penyeleng			760.000.000,00	KECAMATAN

			an Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan									Kelapa Dua, Pakulonan Barat	DAERAH (PAD)	i politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	garaan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik				KELAPA DUA
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase pemenuhan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan**				**100 Persen**	**100 Persen**	**8.974.030.597,00**	**10.096.529.865,00**	**9.480.432.265,00**	**-2.256.695.243,00**							**6.717.335.354,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase pemenuhan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan*				100 Persen	100 Persen	6.414.114.597,00	8.063.757.665,00	7.664.590.065,00	1.250.475.468,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Meningkatkan Perekonomian Masyarakat	Masyarakat		6.717.335.354,00	KECAMATAN KELAPA DUA
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangun				1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	30.000.000,00	32.545.800,00	32.545.800,00	2.545.800,00	Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Pakulonan Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan	Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Meningkatkan Perekonomian Masyarakat			31.000.000,00	KECAMATAN KELAPA DUA

			an di Kelurahan											ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.					
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			4 Unit	4 Unit	850.000.000,00	1.265.000.000,00	1.265.000.000,00	415.000.000,00	Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Pakulonan Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Meningkatkan Perekonomian Masyarakat			900.000.000,00	KECAMATAN KELAPA DUA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Keluraha n			2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	325.064.800,00	401.309.400,00	349.430.200,00	24.365.400,00	Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Pakulonan Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Meningkatkan Perekonomian Masyarakat			327.000.000,00	KECAMATAN KELAPA DUA
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase penurunan gangguan trantibum yang ditindaklanjuti**			**10 Persen**	**10 Persen**	**382.289.600,00**	**451.161.200,00**	**350.187.600,00**	**-88.600.400,00**							**293.689.200,00**	

	7.01.04.2.01	Koordinasi	*Prosentase*	100	100	382.289.600,00	451.161.200,00	350.187.600,00	-32.102.000,00			Memperkuat	Meningkatkan	Masyarakat	293.689.200,00	KECAMAT

		Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*gangguan trantibum yang ditindaklanjuti kecamatan Kelapa Dua*	Persen	Persen							penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			AN KELAPA DUA
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	76.000.000,00	146.318.000,00	127.123.200,00	51.123.200,00	Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Pakulonan Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik		77.000.000,00	KECAMATAN KELAPA DUA
		KELURAHAN BOJONGNANGKA				**36.403.029.700,00**	**47.214.475.059,00**	**47.482.764.530,00**	**11.079.734.830,00**						**33.006.999.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**36.403.029.700,00**	**47.214.475.059,00**	**47.482.764.530,00**	**11.079.734.830,00**						**33.006.999.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**				**36.403.029.700,00**	**47.214.475.059,00**	**47.482.764.530,00**	**11.079.734.830,00**						**33.006.999.000,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan**	**100 Persen**	**100 Persen**	**21.327.559.003,00**	**21.238.795.194,00**	**22.120.559.865,00**	**-606.520.557,00**						**20.721.038.446,00**	
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian*	100 Persen	100 Persen	317.374.600,00	327.628.000,00	322.536.000,00	5.161.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola	Pegawai Kelurahan Bojongnangka	335.678.800,00	KECAMATAN KELAPA DUA

			kecamatan Kelapa Dua									birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya															
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	11 Paket	11 Paket	17.500.000,00	17.482.000,00	17.482.000,00	-18.000,00	Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Bojong Nangka	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik		19.000.000,00	KECAMATAN KELAPA DUA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan administrasi umum kecamatan Kelapa Dua*				100 Persen	100 Persen	1.904.905.900,00	1.536.289.670,00	1.567.300.970,00	-337.604.930,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkat	Pegawai Kelurahan Bojongnangka		2.014.581.046,00	KECAMATAN KELAPA DUA

															pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	kan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik				
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	5.238.000,00	4.486.000,00	4.486.000,00	-752.000,00	Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Bojong Nangka	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			7.000.000,00	KECAMATAN KELAPA DUA
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				18 Paket	18 Paket	72.900.000,00	62.593.850,00	62.593.850,00	-10.306.150,00	Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Bojong Nangka	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			74.000.000,00	KECAMATAN KELAPA DUA
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																	
			Jumlah				25 Paket	25 Paket	30.930.400,00	21.243.500,00	21.243.500,00	-9.686.900,00	Kab. Tangera	PENDAPATAN	Memperkuat	Meningkatkan			38.000.000,00	KECAMAT

			Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan									ng, Kelapa Dua, Bojong Nangka	ASLI DAERAH (PAD)	reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeluduan.	Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik				AN KELAPA DUA
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			25 Paket	25 Paket	45.290.400,00	26.757.000,00	26.757.000,00	-18.533.400,00	Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Bojong Nangka	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeluduan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			46.000.000,00	KECAMATAN KELAPA DUA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			13 Paket	13 Paket	12.208.800,00	14.685.350,00	10.665.350,00	-1.543.450,00	Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Bojong Nangka	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba,	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerinta			13.000.000,00	KECAMATAN KELAPA DUA

														judi, dan penyeludupan.	han yang Baik				

7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu															
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	31.750.400,00	26.620.000,00	22.060.000,00	-9.690.400,00	Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Bojong Nangka	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik		29.000.000,00	KECAMATAN KELAPA DUA
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pemenuhan jasa penunjang kecamatan Kelapa Dua*	100 Persen	100 Persen	3.173.901.477,00	3.303.487.205,00	3.555.859.205,00	381.957.728,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Pegawai Kelurahan Bojongnangka	1.928.272.600,00	KECAMATAN KELAPA DUA
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik															
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan	92.620.800,00	102.297.600,00	102.297.600,00	9.676.800,00	Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Bojong Nangka	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik		101.000.000,00	KECAMATAN KELAPA DUA
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor															
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	12 Laporan	12 Laporan	306.856.000,00	312.068.000,00	312.068.000,00	5.212.000,00	Kab. Tangerang, Kelapa Dua,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan		231.000.000,00	KECAMATAN KELAPA DUA

		Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan							Bojong Nangka		birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah kecamatan Kelapa Dua*	100 Persen	100 Persen	2.851.886.900,00	2.887.552.936,00	2.887.552.936,00	35.666.036,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Pegawai Kelurahan Bojongnangka	3.249.506.000,00	KECAMATAN KELAPA DUA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase penurunan gangguan trantibum yang ditindaklanjuti**				**10 Persen**	**10 Persen**	**382.289.600,00**	**451.161.200,00**	**350.187.600,00**	**-88.600.400,00**							**293.689.200,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya	*Prosentase gangguan trantibum*				100 Persen	100 Persen	382.289.600,00	451.161.200,00	350.187.600,00	-32.102.000,00			Memperkuat penyela	Meningkatkan Penyeleng	Masyarakat		293.689.200,00	KECAMATAN

		Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*yang ditindaklanjuti kecamatan Kelapa Dua*											rasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	garaan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik				KELAPA DUA
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																	
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	43.200.000,00	43.160.000,00	23.750.000,00	-19.450.000,00	Kab. Tangerang, Kelapa Dua, Bencongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			45.000.000,00	KECAMATAN KELAPA DUA

														mencapai masyarakat yang adil dan makmur.					
	J U M L A H								**36.403.029.700,00**	**47.214.475.059,00**	**47.482.764.530,00**	**11.079.734.830,00**						**33.006.999.000,00**	

BAB I V
PENUTUP

Renja Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang Tahun 2025 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun kedepan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

A. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Renja Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang Tahun 2025 antara lain :

1. Perumusan program dan kegiatan beserta indikatornya pada Renja Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tangerang;
2. Penyusunan Renja Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang 2025 merupakan pedoman dalam melakukan kegiatan kecamatan pada tahun 2025. Selain itu terdapat penambahan output/ keluaran kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Kecamatan Kelapa Dua;
3. Penyusunan Renja Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang ini juga berpedoman pada RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2025, dengan tujuanuntuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

B. Kaidah Pelaksanaan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan sebagai pengganti Permendagri

Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka kaidah-kaidah penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang berpedoman pada RPD tahun pertama yaitu 2025 dan Ranwal RKPD Kabupaten Tangerang tahun 2025 dan Surat Edaran Bupati Tangerang Nomor 050.13/343-Bappeda tentang Penyusunan Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah dan Pedoman Penyelenggaraan Musrembang RKPD Kabupaten Tangeran tahun 2025.
2. Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang tahun 2025 adalah upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan

kegiatan yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Tangerang dengan berpedoman dengan dokumen perencanaan.

C. Rencana Tindak Lanjut

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang tahun 2025 dilakukan sebagai upaya untuk menciptakan keselarasan atas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tangerang tahun 2025 sehingga tercipta sinergi dalam pelaksanaan pembangunannya.

57. Kecamatan Solear

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kegiatan Pembangunan di Kecamatan Solear senantiasa mengacu kepada rencana Visi, Misi dan Arah Pembangunan Kabupaten Tangerang 5 Tahun Kedepan (Tahun 2019-2024), dengan penyelarasan program dan kegiatan yang direncanakan serta rekomendasi kebijakan pada tahun 2025 dalam rangka implementasi "**Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Tangerang Yang Cerdas, Makmur, Religius, Dan Berwawasan Lingkungan**" melalui 15 program unggulan. Maka sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan sosial masyarakat Kabupaten Tangerang, khususnya di Kecamatan Solear kegiatan pembangunan yang sudah, sedang dan akan yang datang kita lakukan perlu diteliti, dikaji dan dievaluasi untuk difasilitasi, dikoordinasikan dan disinergikan sesuai dengan kewenangan dari berbagai sektor.

Kecamatan Solear merupakan salah satu wilayah Kabupaten Tangerang yang terletak di bagian barat Kabupaten Tangerang yang terbentuk Berdasarkan Perda No.20 Tahun 2006 dengan mayoritas masyarakat agraris dengan tingkat sosial dan ekonomi yang tidak merata yang memerlukan perhatian dari berbagai sektor antara lain : Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi, Ketenagakerjaan, Jaminan Sosial, Pengganggguran dan Pengentasan Kemiskinan juga infrastruktur yang perlu mendapat perhatian khusus saat ini. Upaya penanganan masalah tersebut tidak bisa hanya dilakukan oleh Pemerintah Daerah saja tetapi juga memerlukan kerja keras dan komitmen bersama antar masyarakat, pemerintah dan stakeholders di Kabupaten Tangerang baik melalui intervensi program ataupun perubahan sistem yang efektif terhadap bidang-bidang yang bersentuhan langsung dengan permasalahan tersebut.

Untuk itu dalam rangka meningkatkan sinergitas, sinkronisasi dan integrasi segenap potensi di Kabupaten Tangerang, serta menjaga keberlanjutan pelaksanaan pembangunan perlu ditetapkan pedoman bagi seluruh pelaku pembangunan (stakeholders) dalam memberi kontribusi bagi pembangunan Daerah di Kabupaten Tangerang khususnya di Kecamatan Solear.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Solear Tahun 2024 mengacu pada Landasan Hukum yaitu :

a. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN);
b. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
c. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

d. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
e. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
f. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
g. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
h. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembangunan Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
i. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
j. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Propinsi Banten
k. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
l. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
m. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintahan, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
o. PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
p. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 tahun 2009 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Daerah;
q. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2005 - 2025;
r. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang Tahun 2011-2031
s. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor.08 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang.
t. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 113 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang.

1.3 Maksud dan Tujuan Renja Kecamatan Solear

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Solear, sesuai jadwal yang merupakan gambaran program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dan telah diamanatkan oleh Undang-undang serta dapat perkiraan akan kebutuhan pendanaan untuk Tahun 2025, yang disusun

dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) dan dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Kecamatan Solear Tahun 2025.

Dengan tujuan disusunnya Rencana Perubahan Kerja Kecamatan Solear adalah sebagai acuan yang akan dilaksanakan Program dan Kegiatan serta diberikan Anggaran yang memadai dalam Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2025 untuk Kecamatan Solear.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

BAB II Hasil Evaluasi Renja Kecamatan Solear Tahun Lalu

2.1. Evaluasi Pelaksanaan RENJA Tahun Lalu dan Capaian Renstra
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan di Kecamatan Solear
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III Tujuan Sasaran Program Dan Kegiatan

Menjelaskan tentang

3.1. Telaah Kebijakan Nasional
3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Kecamatan Solear

BAB IV Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB V Penutup

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Solear Tahun Lalu

Secara umum Recana Kerja (Renja) Kecamatan Solear Tahun 2024 memuat rencana program dan kegiatan dengan tetap memperhatikan potensi yang ada dalam rangka "***Mewujudkan Masyarakat Kecamatan Solear yang cerdas, mandiri, religius yang berorientasi pengembangan pariwisata yang berwawasan lingkungan***". Keberhasilan suatu proses perencanaan akan bisa dilihat dari hasil evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya, sejauh mana pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan berdampak terhadap capian yang telah ditetapkan di dalam Renstra SKPD, hasil dari evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang.

Pada Tahun 2024 Kecamatan Solear memiliki Anggaran sebesar Rp. **19.625.718.219** yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. **9.766.150.740.70** dan Belanja Modal sebesar Rp. **9.859.567.478.30**, berikut adalah table Anggaran Kecamatan Solear Tahun 2024.

Tabel 2.1
Anggaran Kecamatan Solear Tahun 2024

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5	**BELANJA DAERAH**				
5.1	**BELANJA OPERASI**	**8.997.891.277,00**	**9.766.150.740,70**	**768.259.463,70**	**8,54**
5.1.01	Belanja Pegawai	4.369.661.145,00	4.393.193.554,20	23.532.409,20	0,54
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.628.230.132,00	5.372.957.186,50	744.727.054,50	16,09
5.2	**BELANJA MODAL**	**6.694.140.421,00**	**9.859.567.478,30**	**3.165.427.057,30**	**47,29**
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	289.727.500,00	275.467.000,00	(14.260.500,00)	(4,92)
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	100.000.000,00	359.969.200,00	259.969.200,00	259,97
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	6.296.562.621,00	9.216.280.978,30	2.919.718.357,30	46,37
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	7.850.300,00	7.850.300,00	0,00	0,00
	JUMLAH BELANJA DAERAH	**15.692.031.698,00**	**19.625.718.219,00**	**3.933.686.521,00**	**25,07**
	SURPLUS / (DEFISIT)	**(15.692.031.698,00)**	**(19.625.718.219,00)**	**(3.933.686.521,00)**	**25,07**

Realisasi Anggaran untuk Tahun 2024 untuk Belanja Operasi mulai dari Bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2024 mencapai Rp. 9.642.302.738 atau 98.73 % dari pagu anggaran

No	Uraian	Jumlah (Rp.)		Lebih / (Kurang)	
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp.)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
5	**BELANJA DAERAH**				
5.1	**BELANJA OPERASI**	**9.766.150.740,70**	**9.642.302.738,00**	**(123.848.002,70)**	**98,73**
5.1.01	Belanja Pegawai	4.393.193.554,20	4.323.023.089,00	(70.170.465,20)	98,40
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.372.957.186,50	5.319.279.649,00	(53.677.537,50)	99,00
5.2	**BELANJA MODAL**	**9.859.567.478,30**	**9.833.070.574,00**	**(26.496.904,30)**	**99,73**
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	275.467.000,00	262.502.400,00	(12.964.600,00)	95,29
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	359.969.200,00	359.819.200,00	(150.000,00)	99,96
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	9.216.280.978,30	9.210.748.974,00	(5.532.004,30)	99,94
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	7.850.300,00	0,00	(7.850.300,00)	0,00
	JUMLAH BELANJA DAERAH	**19.625.718.219,00**	**19.475.373.312,00**	**(150.344.907,00)**	**99,23**
	SURPLUS / (DEFISIT)	**(19.625.718.219,00)**	**(19.475.373.312,00)**	**150.344.907,00**	**99,23**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	**(19.625.718.219,00)**	**(19.475.373.312,00)**	**150.344.907,00**	**99,23**

sebesar Rp. 9.766.150.740.70 sedangkan untuk Belanja Modal Realisasi mencapai Rp. 9.833.070.574 atau 99.73 % dari pagu anggaran sebesar Rp. 9.859.567.478,30. Dari pagu anggaran sebesar Rp. 19.625.718.219 Kecamatan Solear mampu merealisasikan penyerapan anggaran sebesar Rp. 19.475.373.312 atau 99.23 %.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan di Kecamatan Solear Tahun 2024

Pada pelayanan kinerja Kecamatan Solear pada umumnya tercapai sesuai dengan apa yang digariskan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang, yaitu dengan melaksanakan berbagai pelayanan, diantaranya :

1. Pelayanan Non Perjinan :
   a. Pengantar Pengajuan Pencetakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP)
   b. Pengantar Pengajuan Kartu Keluarga (KK)
   c. Pengantar Surat Pindah antar Kabupaten/Kota atau antar Provinsi
   d. Surat Pindah antar Kecamatan Dalam Kabupaten
   e. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)
   f. Surat Pengantar Ijin Keramaian
   g. Surat Keterangan Ahli Waris
   h. Surat Pengantar Permohonan Pinjaman Bank
   i. Daftar Susunan Keluarga (Dokumen Pendukung Pensiun)
   j. Rekomendasi Proposal (Bantuan Sosial/Ekonomi/Usaha/Program/Fisik)
2. Pelayanan Perizinan
   a. Ijin Ganguan Intensitas Rendah (HO)
   b. Ijin Menderikan Bangunan Rumah Tinggal Tidak Bertingkat (IMB).

Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Solear

No	Sasaran	Indikator Kinerja		Satuan	Target Tahunan	Target Akhir Renstra	Triwulan	Target	Realisasi	Capaian(%)	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	L
1	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	1.1	Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	%	57.10	71.4	Triwulan 1	10	10	100.00	
							Triwulan 2	20	20	100.00	
							Triwulan 3	10			
							Triwulan 4	17.1			
							Kondisi Akhir (F)				
2	Meningkatnya akuntabilitas Perangkat Daerah	2.1	Nilai AKIP Kecamatan Solear	Angka	73	76	Triwulan 1	73	73	100.00	
							Triwulan 2	0	0		
							Triwulan 3	0			
							Triwulan 4	0			
							Kondisi Akhir (F)				
3	Meningkatnya pelayanan masyarakat	3.1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	84	85	Triwulan 1	84	84	100.00	
							Triwulan 2	0	0		
							Triwulan 3	0			
							Triwulan 4	0			
							Kondisi Akhir (F)				

2.3 Isu -isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Kecamatan Solear pada Tahun 2024 memiliki beberapa isu-isu dan permasalahan yang harus diselesaikan, yaitu sebagai berikut.

2.3.1 Lingkungan Hidup

Salah satu isu dan permasalahan yang dihadapi Kecamatan Solear pada Tahun 2023 adalah tentang lingkungan hidup khusunya persampahan. Masalah persampahan yang ada di Kecamatan Solear

timbul dikarenakan minimnya sarana dan prasarana persampahan yang ada selain itu, masih rendahnya kesadaran masyarakat di wilayah Kecamatan Solear tentang pola hidup sehat dan seringnya buang sampah sembarangan.

2.3.2 Pendidikan

Walaupun Pendidikan di Kecamatan Solear mengalami kemajuan namun hal ini tidak serta merta tidak adanya masalah. Isu atau permasalahan yang dihadapi dunia Pendidikan di Kecamatan Solear cukup komplek diantaranya masih minimnya Ruang Kelas Baru, sempitnya lahan sekolah, banyaknya sekolah yang harus di renovasi dan masih terbatasnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan belajar mengajar yang mengakibatkan kurang efektifnya kegiatan belajar.

2.3.3 Ekonomi

Pembinaan UMKM di wilayah Kecamatan Solear terasa belum optimal sehingga perlu diadakannya Pembinaan lebih intensif serta pemberian modal untuk mengembangkan UMKM yang ada di wilayah Kecamatan Solear.

2.3.4 Pelayanan Publik

Mutu atau kualitas Pelayanan Publik yang prima disuatu Kecamatan merupakan suatu hal yang harus dimiliki untuk melayani masyarakat. Namun di Kecamatan Solear pelayanan publik terasa belum optimal. Hal ini dikarenakan Sumber Daya Manusia yang ada di Kecamatan Solear terbatas baik dari segi Kuantitas dan Kualitas, Infrastruktur penunjang Pelayanan Publik yang minim mengakibatkan pelayanan kurang optimal.

2.3.5 Infrastruktur

Tidak meratanya pembangunan serta kurang baiknya kualitas infrastruktur yang ada di wilayah Kecamatan Solear menjadi salah satu isu atau permasalahan yang menjadi sorotan dari beberapa elemen masyarakat. Permasalahan ini harus segera diatasi agar masyarakat dapat menerima manfaat dari kegiatan pembangunan di Kecamatan Solear.

2.3.6 Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan yang sangat penting bagi masyarakat khususnya masyarakat di wilayah Kecamatan Solear yang harus dipenuhi oleh Pemerintah. Namun pelayanan kesehatan di wilayah Kecamatan Solear belum maksimal, seperti kuarangnya jumlah Posyandu, sarana dan prasarana yang minim untuk menunjang operasional kesehatan di Puskesmas serta tenaga kesehatan yang terbatas menjadi beberapa faktor belum optimalnya pelayanan kesehatan di wilayah Kecamatan Solear.

Kecamatan Solear merupakan unsur Kecamatan dipimpin oleh Seorang Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Tangerang. Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya Camat Kecamatan Solear mempunyai fungsi :

a. Menyelenggarakan Pemerintahan
b. Menyelenggarakan Pembangunan
c. Pembinaan kehidupan kemasyarakatan

Tugas pokok dan fungsi tata kerja kecamatan berdasarkan Berdasarkan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 113 Tahun 2016

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Tangerang.

1. Camat

Camat sebagai pelaksana Pemerintah Daerah di tingkat Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan Bupati dan tugas pemerintahan lainnya.Untuk melaksanakan tugas Camat mempunyai fungsi.

a. Penyiapan rumusan kebijakan tehnis pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan, penyelenggaraan kegiatan Desa dan Kelurahan, dan pelayanan Publik yang menjadi ruang lingkup tugasnya di Kecamatan;
b. Penyiapan rencana dan program kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan, penyelenggaraan kegiatan Desa dan Kelurahan, dan pelayanan Publik yang menjadi ruang lingkup tugasnya di Kecamatan;
c. Penyiapan koordinasi kegiatan Pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan, penyelenggaraan kegiatan Desa dan Kelurahan, dan pelayanan Publik yang menjadi ruang lingkup tugasnya di Kecamatan;
d. Penyiapan pengawasan dan pengendalian kegiatan Pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan, penyelenggaraan kegiatan Desa dan Kelurahan, dan pelayanan Publik yang menjadi ruang lingkup tugasnya di Kecamatan;
e. Penyiapan bimbingan pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan, penyelenggaraan kegiatan Desa dan Kelurahan, dan pelayanan Publik yang menjadi ruang lingkup tugasnya di Kecamatan;
f. Pengelolaan administrasi dan pelaporan pengelolaan kegiatan Pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan

Bupati, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan, penyelenggaraan kegiatan Desa dan Kelurahan, dan pelayanan Publik yang menjadi ruang lingkup tugasnya di Kecamatan;

2. Sekretariat Kecamatan

Sekretris Camat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pembinaan dan pengendalian kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan program kerja, keuangan serta pengkoordinasian tugas satuan organisasi di lingkungan kecamatan. Untuk melaksanakan tugas Sekretariat Kecamatan mempunyai fungsi :

a. Penyiapan perumusan kebijakan tehnis pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan, pengelolaan perencanaan program kerja kecamatan, evaluasi dan pelaporan;
b. Penyiapan rencana dan program pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan, pengelolaan perencanaan program kerja kecamatan, evaluasi dan pelaporan;
c. Penyiapan pengendalian pelaksanaan urusan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan, pengelolaan perencanaan program kerja kecamatan, evaluasi dan pelaporan;
d. Penyiapan bimbingan pelaksanaan urusan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan, pengelolaan perencanaan program kerja kecamatan, evaluasi dan pelaporan; Pelaksanaan pengelolaan administrasi dan penatausahaan keuangan;
e. Pengelolaan administrasi pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan, pengelolaan perencanaan program kerja kecamatan, evaluasi dan pelaporan;

Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris Kecamatan yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat;

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan kepegawaian mempunyai tugas melakukan kegiatan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, kerumahtangaan, dan kehumasan di lingkungan kecamatan. Untuk melaksanakan tugas Sub Bagian Perencanaan dan keuangan mempunyai fungsi

a. merencanakan kegiatan umum dan kepegawaian program kerja operasional pelayanan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, kerumahtanggan, dan informasi kehumasan di kecamatan;
b. membimbing pelaksanaan kegiatan umum yang meliputi : surat meyurat, penggandaan, pengiriman, pengarsipan, tata naskah dinas , Inventarisasi aset dan persediaan pengadaan barang dan jasa, pendistribusian, Stock Outname, fasilitasi pengelolaan

Informasi dan dokumen (PID), perjalanan dinas danpemeliharaan barang inventaris;

c. membimbing pelaksanaan kegiatan kepegawaian meliputi : layanan administrasi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala (KGB), Datar urut kepangkatan (DUK), data pegawai, Kartu Pegawai (Karpeg), Karis/Karsu, tinjang anak/keluarga dan jabatan, asuransi kesehatan, tabungan pensiun, tabungan perumahan, pensiun, usulan formasi pegawai, usulanizin belajar, usulan diklat pegawai, usulan pemberian penghargaan tanda kehormatan, teguran disiplin pegawai, usulan cuti pegawai, usulan perpindahan/cuti pegawai, pengelolaan standar kompetensi pegawai (SKP);
d. membimbing pelaksanaan kegiatan umum dan kepegawaian yang meliputi : pembinaan dan pengembangan pegawai kecamatan, pembinaan dan supervisi pengelolaan dan pendayagunaan aset daerah yang dikelola oleh kelurahan, urusan rumah tangga dan informasi kehumasan di kecamatan;
e. membagi tugas pelaksanaan kegiatan umum meliputi : surat menyurat, penggandaan, pengiriman, pengarsipan, tata naskah dinas,Inventarisasi Aset dan penyediaan pengadaan barang dan jasa, pendistribusian, Stock Opnam, fasilitasi pengelola informasi dan dokumen (PID), perjalanan dinas dan pemelihaan barang-barang inventaris;
f. membagi tugas pelaksanaan administrasi umum kepegawaian di lingkup kecamatan yang meliputi layanan administrasi, kenaikan gaji berkala (KGB), Datar urut kepangkatan (DUK), data pegawai, Kartu Pegawai (Karpeg), Karis/Karsu, tinjang anak/keluarga dan jabatan, asuransi kesehatan, tabungan pensiun, tabungan perumahan, pensiun, usulan formasi pegawai, usulan izin belajar, usulan diklat pegawai, usulan pemberian penghargaan tanda kehormatan, teguran disiplin pegawai, usulan cuti pegawai, usulan perpindahan/cuti pegawai, pengelolaan standar kompetensi pegawai (SKP);
g. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan umum dan kepegawaian dan mengenventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya;
h. membuat laporan pelaksanaan kegiatan umum dan kepegawaian yang emliputi : laporan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang, administrasi Aset daerah di lingkup kecamatan, penilaian prestasi kerja pegawai kecamatan sesuai dengan ketentuan perundang undanganyang berlaku;
i. melekasanakan tugas kegdinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

4. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Subag Perncanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan kegiatan penyusunan perencanaan dan program kerja kecamatan, serta pengelolaan adamistrasi pengelolaan keuangan kecamatan Untuk melaksanakan tugas subag Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi :

a. merencanakan kegiatan Perencanaan dan Keuangan;

b. membimbing pelaksanaan kegiatan perencanaan yang meliputi : RPJMD, Rencana Strategis, Rencana Kerja, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja, Penyususnan Dokumen RKA/DPA.RRKA/DPPA, Forum SKPD, Monitoring dan Evaluasi, pelaksanaan pengembangan e-gonerment, serta laporan Kinerja Istansi Pemerintah, melkukan pengkoordinasian penyususnan rencana program dan kegiatan kecamatan meliputi Rencana Setrategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencan Kegiatan dan Anggaran (RKA), dan Penetapan Kinerja (PK);
c. membimbing pelaksnaan kegiatan administrasi keuangan meliputi : Pengajuan Suarat Membeyar Uang Persediaan, Ganti Uang, Tambahan Uang, LS Bendahara, LS Pihak Ketiga dan Ganti Uang Ninhil, Pencairan, Pencatatan, Pembukuan serta Pelaporan Pertanggungjawaban Anggaran
d. membagi tugas pelaksanaan kegiatan administrasi perencanaan yang meliputi : RPJMD, Rencana Strategis, Rencana Kerja, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja, Penyususnan Dokumen RKA/DPA.RRKA/DPPA, Forum SKPD, Monitoring dan Evaluasi, pelaksanaan pengembangan e-gonerment, serta laporan Kinerja Istansi Pemerintah;
e. membagi tiugas pelaksanaan kegiatan administrasi Pengajuan Suarat Membeyar Uang Persediaan, Ganti Uang, Tambahan Uang, LS Bendahara, LS Pihak Ketiga dan Ganti Uang Ninhil, Pencairan, Pencatatan, Pembukuan serta Pelaporan Pertanggungjawaban Anggaran
f. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan perencanaan dan keuangan dan mengenventarisir permasalahan di lingkup tugasnya;
g. membuat laporan pelaksanaan kegiatan perencanaan dan keauangan yang meliputi : Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK), dan RPJMD, Rencana Strategis , Rencana Kerja, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja, Penyusunan Dokumen RKA/DPA, RRKA/DPPA, Fasilitasi Perencanaan SKPD, Monitoring dan Evaluasi, e-Reperting, Riviu Penyerapan Anggaran, Data Pembanguna SKPD, Pelaksanaan Pengembangan e-goverment serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

5. Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melakukan penyusunan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan umum, pengkoordinasian kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan, serta pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerinthan desa dan kelurahan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :

a. merencanakan kegiatan pemerintahan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
b. membimbing pelaksanaan kegiatan pemerinthan umum meliputi : pengelolaan profil dan monografi desa/kelurahan serta kecamatan, perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikan di bidang penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, penyusunan peraturan desa dan peraturan desa;
c. Membimbing pelaksanaan kegiatan fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi tata pemerintahan desa dan kelurahan, fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa, fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa/lurah dan perangkat desa/kelurahan, fasilitasi pelaksanaan pemeilihan kepala desa, fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa, fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan pedesaan, memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif di desa dan kelurahan, memfasilitasi kerja sama antar Desa dan kerja sama Desa dengan pihak ketiga;
d. Membagi tugas pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan pemerintahan umum;
e. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pemerintahan umum yang meliputi Rancana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa), Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa);
f. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan pemerintahan umum;
g. Pengumpulan bahan untuk camat merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa;
h. Pengumpulan bahan dan melkasanakan kebijakan camat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan/didelegasikan Bupati kepada Camat sesuai dengan lingkup tugasnya;
i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikuan oleh atas terkait dengan tugas dan fungsinya

Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Camat.

6. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyususnan kegiatan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat dan kesejahteraan sosial di kecamatan.

a. merencanakan kegiatan yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat;
b. membimbing pelaksanaan yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat yang meliputi : fasiltasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masrarakat desa dan kelurahan;
c. membimbing pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;

d. membimbing pelaksanaan kegiatan penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah penyakit skala kecamatan, masalah pencemaran lingkungan, serta masalah kesejahteraan sosila di kecamatan dan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah/instansi terkait;
e. membagi tugas pelaksanaan kegiatan yang terakait dengan pemberdayaan masyarakat;
f. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan terkait dengan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta dan meninventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
g. membuat laporan pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat;
h. mengumpuilkan bahan dan melkasanakan kebijakan camat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan/didelegasikan bupati kepada camat sesuai dengan lingkup tugasnya;
i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

7. Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat

Seksi Ketertraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyusunan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan Ketertiban umum serta penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di kecamatan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Ketertraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat mempunyai rincian tugas :

a. merencanakan kegiatann yang terkait dengan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat membimbing pelaksanaan kegiatan tanggap bencana lingkup kecamatan;
b. Membimbing pelaksanaan kegiatan fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang undangan di desa dan kelurahan, membimbing anggota Linmas yang berada di wilayah kerja kecamatan;
c. Membimbing pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan meliputimkoordinasi dengan kepolisisn Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia, serta pemuka agama yang berada di wilayah desa dan kelurahan;
d. Membagi tugas pelaksanaan kegiatan terkait dengan ketentraman dan ketertiban dan perlindungan masyarakat desa dan kelurahan;
e. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan ketentraman dan ketertiban dan perlindungan masyarakat dan menenventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya;
f. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan ketentraman dan ketertiban dan perlindungan masyarakat;
g. Mengumpulkan bahan dan melaksanakan kebiajakan camat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang

dilimpahkan/didelegasikan bupati kepada camata sesuai dengan lingkup tugasnya;

h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan in yang diberikan oleh atasan sesuai tgas dan fungsinya.

Seksi Ketertraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan;

8. Seksi Perekonomian dan Pembangunan

Seksi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas melakukan penyusunan kegiatan bidang perekonomian dan pembangunan serta pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di kecamatan. Untuk melaksanakan tugas, sebagaimana dimaksud Seksi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai rincian :

a. Merencanakan kegiatan yang terkait dengan Perekonomian dan Pembangunan;
b. Membimbing pelaksanaan kegiatan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang meliputi koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasiltas pelayanan umum, koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum;
c. Membimbing dan mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan;
d. Membagi tugas pelaksanaan program kegiatan yang terkait dengan Perekonomian dan Pembangunan;
e. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan Perekonomian dan Pembangunan dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
f. Menevaluasi pelaksanaan kegiatan yang terkait denagan Perekonomian dan Pembangunan dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
g. Mengumpukan bahan dan melaksanakan kebijakan camat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan/didelegasikan bupati kepada camat sesuai dengan lingkup tugasnya yang meliputi bidang ekonomi, pekerjaan umum dan pembangunan;
h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

Seksi Perekonomian dan Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala seksi Perekonomian dan Pembangunanyang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan;

9. Seksi Pelayanan

Seksi Pealayanan mempunyai tugas melakukan penyusunan kegiatan pelayan publik lingkup bidang perizinan

dan non perizinan sesuai dengan kewenangan kecamatan.Untuk melaksanakan tugas, sebagaimana dimaksud Seksi Pelayan mempunyai rincian tugas :

a. Merencanakan kegiatan yang terkait dengan pelayanan;
b. Membimbing pelaksanaan kegaiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
c. Membimbing pelaksanaan kegiatan percepatan pencapaian stadar minimal di wilayah kecamatan, pendistribusian dan pengumpulan formulir pengukuran Indek Kepuasan Masyarakat yang berasal dari Perangkat Daerah yang membidangi pembinanan pelayanan publik;
d. Membimbing penyelenggaraan Pelayan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dengan Perangkat Daerah dan/atau keluhan dari masyarakat;
e. Membimbing pelaksanaan standar pelayanan publik dan stadr operasioanal prosedur pelayanan;
f. Membagi tugas pelaksanaan program kegiatan yangterkait dengan pelayanan;
g. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan yang terkait denagn pelayanan;
h. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan pelayanan dan mengenventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya yang meliputi evaluasi terhadap kinerja pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
i. Mengumpulkan bahan dan melaksanakan kebijakan camat dalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan/didelegasikan bupati kepad camat sesuaiu dengan lingkup tugasnya;
j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya;

Seksi Pelayanan dipimpin oleh seorang Kepala seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan;

TABEL.2.I
BAGAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
KECAMATAN SOLEAR KABUPATEN TANGERAN

Peraturan Bupati Tangerang
Nomor 113 Tahun 2016
Tentang Kedudukan, Susunan

Tugas Dan Fungsi Serta
Tata Kerja Kecamatan
Di Lingkungan Pemerintahan
Kabupaten Tangerang

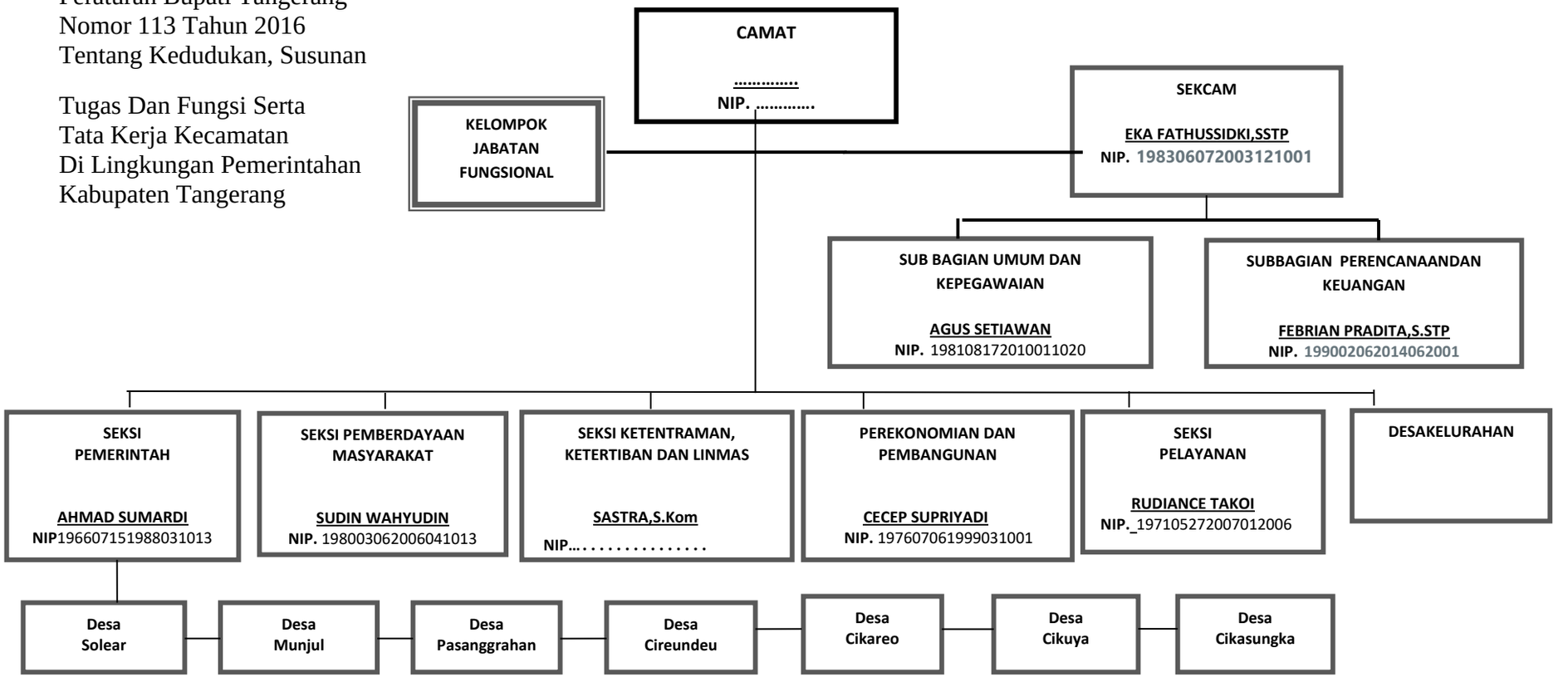

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 20 dinyatakan bahwa Bappeda menyiapkan rancangan awal RKPD sebagai penjabaran dari RPJM daerah. Hal ini ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintahan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dimana dalam Pasal 17 dijelaskan bahwa Bappeda menyusun rancangan awal RKPD, yang merupakan penjabaran dari RPJMD dan memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program proritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Kepala Bappeda bertugas mengkoordinasikan penyusunan rancangan RKPD dengan menggunakan rancangan Renja-SKPD dengan kepala SKPD dan rancangan RKPD tersebut akan menjadi bahan Musrembang RKPD yang selanjutnya menjadi pedoman bagi penyelenggaraan pembangunan oleh seluruh perangkat daerah, yang secara substansial memuat rencana kerja, program, dan indikasi kegiatan yang bersifat terukur dan berorientasi pada pendekatan fungsi/sub fungsi pembangunan dan Peraturan Pemerintah No. 58 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta pelaksanaan program yang mempertimbangkan kemampuan sumber daya yang tersedia.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan (RKPDP), adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode satu tahun yangmerupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan mengacu pada RKP Nasional, memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Proses penyusunan RKPD ini dilakukan dengan tahapan antara lainreview RPJMD, review usulan program dan kegiatan SKPD tahun lalu dan prioritas untuk tahun rencana, serta analisis isu strategis dan prioritas pembangunan daerah untuk tahun yang direncanakan bersama para pemangku kepentingan terkait. Didalam perumusan RKPD didasarkan kepada kesepakatan dalam Musrenbang tahunan daerah dengan tetap memperhatikan rancangan RKP untuk RKPD Provinsi, dan rancangan RKPD Provinsi untuk RKPD Kabupaten/Kota.

RKPD merupakan acuan bagi daerah dalam menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), dengan demikianKepala daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum APBD (KUA), serta penentuan Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) didasarkan atas dokumen RKPD. KUA dan PPAS yang telah disepakati selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam

proses penyusunan APBD. Dari segi kerangka waktu, penyusunan dokumen RKPD harus diselesaikan pada setiap bulan Mei, sedangkan dokumen APBD harus sudah disahkan paling lambat tanggal 1 Desember. Proses penyusunan RKPD dilakukan secara paralel dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan Rencana Kerja Pewrubahan SKPD (Renja Perubahan SKPD).

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tangerang merupakan rencana aksi untuk tahun keempat dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tangerang.Dengan demikian, rancangan kebijakan pembangunan daerah yang disusun dalam RKPD Kabupaten Tangerang mengacu sepenuhnya kepada target dan prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tangerang.

Rumusan kebijakan pembangunan daerah sebagaimana tersusun dalam RKPD akan dipadukan dengan pokokpokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tangerang dalam kerangka mencari titik-temu dan kesepakatan untukmewujudkan berbagai sasaran-sasaran yang telah tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tangerang, melalui penajaman prioritas program dan kegiatan yang dinilai paling relevan serta memiliki daya ungkit maksimal terhadap sasaran yang telah ditetapkan.

Gambar Proses Penyusunan RKPD

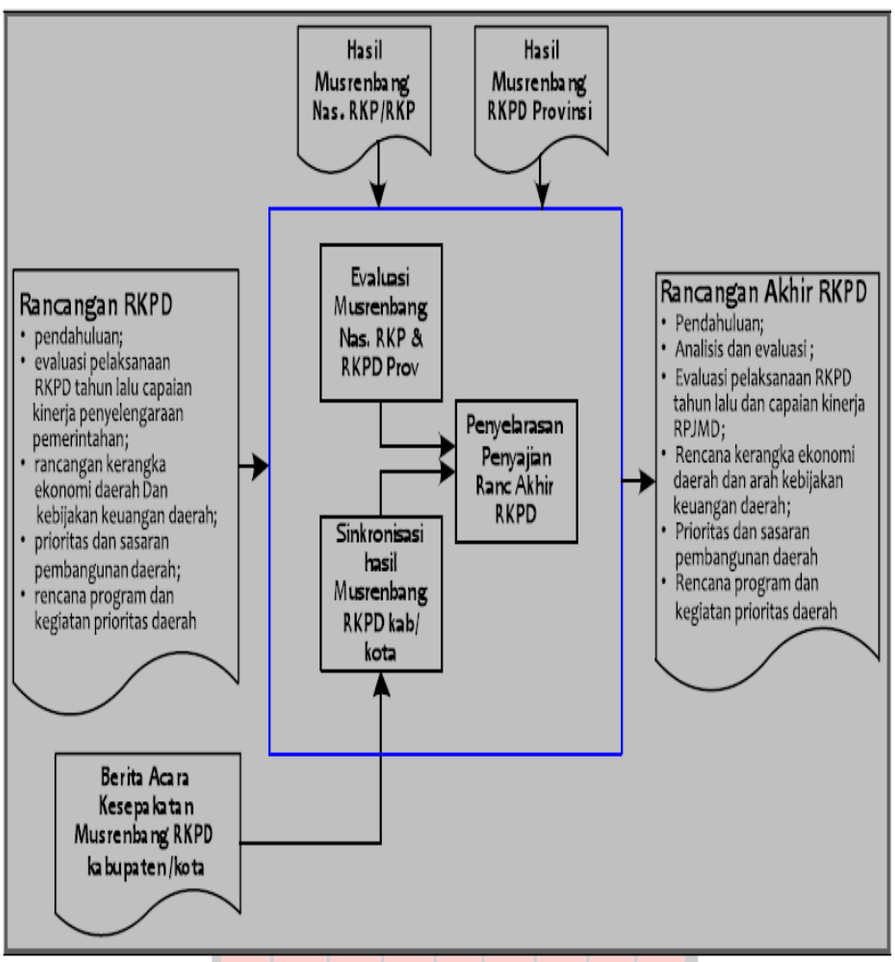

3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja SKPD

3.2.1 Tujuan Renja Perubahan SKPD

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) ke depan. Tujuan ditetapkannya dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa stratejik.Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan Kecamatan Solear, yang ditempuh melalui penetapan beberapa sasaran yang satu dengan lainnya saling terkait, tujuan yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

Tabel Tujuan dan Indikator Tujuan Kecamatan Solear

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal Kinerja		Target Capaian			Kondisi Akhir
						2022*	2023**	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Meningkatkan kualitas pelayanan publik kecamatan**		Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	86,59	86,71	87	88	89	89
		Terpenuhinya pelayanan publik sesuai dengan standar kecamatan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	86,59	86,71	87	88	89	89
		Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja	Nilai AKIP	Nilai AKIP	Nilai	73	76	77	78	80	80

3.2.2 Sasaran Renja SKPD

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintahan dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal Kinerja		Target Capaian			Kondisi Akhir
				2022*	2023**	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	86,59	86,71	87	88	89	89
Terpenuhinya pelayanan publik sesuai dengan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	86,59	86,71	87	88	89	89

standar kecamatan									
Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja	Nilai AKIP	Nilai AKIP	Nilai	73	76	77	78	80	80

3.2.3 Program Dan Kegiatan

Mengacu pada Visi dan Misi Rencana Pembangunana Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 Kabupaten Tangerang, serta tujuan, sasaran dan strategi yang mendukung tercapainya Visi dan Misi tersebut, maka program dan kegiatan pada Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Solear Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

Kode					Uraian	Tahun N						Tahun + 1
						Sebelum			Sesudah			
						Belanja Operasi	Belanja Modal	Jumlah (Rp)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Jumlah (Rp)	
Kecamatan Solear												
7					UNSUR KEWILAYAHAN	Rp. 10.553.014.916	Rp. 8.438.402.330	Rp. 18.991.417.246	Rp. 10.729.198.437	Rp. 11.630.248.801	Rp. 22.359.447.038	Rp. 17.315.000.000,00
7	01				KECAMATAN	Rp. 10.553.014.916	Rp. 8.438.402.330	Rp. 18.991.417.246	Rp. 10.729.198.437	Rp. 11.630.248.801	Rp. 22.359.447.038	Rp. 17.315.000.000,00
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 7.885.536.466	Rp. 303.759.900	Rp. 8.189.296.366	Rp. 7.573.313.387	Rp. 460.439.900	Rp. 8.033.753.287	Rp. 9.365.000.000,00
7	01	01	2		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 85.095.000		Rp. 85.095.000	Rp. 64.131.750		Rp. 64.131.750	Rp. 115.000.000,00
7	01	01	2	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 28.687.000		Rp. 28.687.000	Rp. 20.187.750		Rp. 20.187.750	Rp. 45.000.000,00
7	01	01	2	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 56.408.000		Rp. 56.408.000	Rp. 43.944.000		Rp. 43.944.000	Rp. 70.000.000,00
7	01	01	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 5.345.556.466		Rp. 5.345.556.466	Rp. 5.047.096.781		Rp. 5.047.096.781	Rp. 5.585.000.000,00
7	01	01	2	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 5.264.034.466		Rp. 5.264.034.466	Rp. 5.002.468.781		Rp. 5.002.468.781	Rp. 5.500.000.000,00
7	01	01	2	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp. 30.102.000		Rp. 30.102.000	Rp. 21.242.000		Rp. 21.242.000	Rp. 40.000.000,00
7	01	01	2	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Rp. 31.420.000		Rp. 31.420.000	Rp. 23.386.000		Rp. 23.386.000	Rp. 45.000.000,00
7	01	01	2		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp. 25.480.000		Rp. 25.480.000	Rp. 21.270.000		Rp. 21.270.000	Rp. 35.000.000,00
7	01	01	2	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp. 25.480.000		Rp. 25.480.000	Rp. 21.270.000		Rp. 21.270.000	Rp. 35.000.000,00
7	01	01	2		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 44.146.000		Rp. 44.146.000	Rp. 40.226.000		Rp. 40.226.000	Rp. 125.000.000,00
7	01	01	2	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Rp. 26.760.000		Rp. 26.760.000	Rp. 26.760.000		Rp. 26.760.000	Rp. 80.000.000,00
7	01	01	2	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp. 17.386.000		Rp. 17.386.000	Rp. 13.466.000		Rp. 13.466.000	Rp. 45.000.000,00
7	01	01	2		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 547.182.700	Rp. 257.901.900	Rp. 805.084.600	Rp. 475.930.900	Rp. 257.901.900	Rp. 733.832.800	Rp. 1.155.000.000,00
7	01	01	2	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 28.115.200		Rp. 28.115.200	Rp. 28.115.200		Rp. 28.115.200	Rp. 40.000.000,00
7	01	01	2	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 26.115.800	Rp. 257.901.900	Rp. 284.017.700	Rp. 26.115.800	Rp. 257.901.900	Rp. 284.017.700	Rp. 450.000.000,00
7	01	01	2	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp. 58.696.700		Rp. 58.696.700	Rp. 58.696.700		Rp. 58.696.700	Rp. 95.000.000,00

7	01	01	2	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp. 38.775.000		Rp. 38.775.000	Rp. 30.043.200		Rp. 30.043.200	Rp. 45.000.000,00
7	01	01	2	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp. 34.960.000		Rp. 34.960.000	Rp. 34.960.000		Rp. 34.960.000	Rp. 25.000.000,00
7	01	01	2	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp. 243.000.000		Rp. 243.000.000	Rp. 243.000.000		Rp. 243.000.000	Rp. 300.000.000,00
7	01	01	2	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 117.500.000		Rp. 117.500.000	Rp. 55.000.000		Rp. 55.000.000	Rp. 200.000.000,00
7	01	01	2		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 1.114.400.040		Rp. 1.114.400.040	Rp. 1.208.000.040		Rp. 1.208.000.040	Rp. 1.235.000.000,00
7	01	01	2	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 189.188.472		Rp. 189.188.472	Rp. 189.188.472		Rp. 189.188.472	Rp. 235.000.000,00
7	01	01	2	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 925.211.568		Rp. 925.211.568	Rp. 1.018.811.568		Rp. 1.018.811.568	Rp. 1.000.000.000,00
7	01	01	2		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 723.696.260	Rp. 45.858.000	Rp. 769.554.260	Rp. 716.657.916	Rp. 202.538.000	Rp. 919.195.916	Rp. 1.115.000.000,00
7	01	01	2	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp. 189.909.960		Rp. 189.909.960	Rp. 189.909.960		Rp. 189.909.960	Rp. 300.000.000,00
7	01	01	2	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp. 89.811.000	Rp. 45.858.000	Rp. 135.669.000	Rp. 82.772.656	Rp. 202.538.000	Rp. 285.310.656	Rp. 260.000.000,00
7	01	01	2	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 30.500.000		Rp. 30.500.000	Rp. 30.500.000		Rp. 30.500.000	Rp. 55.000.000,00
7	01	01	2	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp. 413.475.300		Rp. 413.475.300	Rp. 413.475.300		Rp. 413.475.300	Rp. 500.000.000,00
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp. 1.010.744.400	Rp. 8.133.612.430	Rp. 9.144.356.830	Rp. 1.625.582.800	Rp. 11.168.778.701	Rp. 12.794.341.501	Rp. 6.545.000.000,00
7	01	02	2		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Rp. 29.835.000		Rp. 29.835.000	Rp. 24.695.000		Rp. 24.695.000	Rp. 45.000.000,00
7	01	02	2	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp. 29.835.000		Rp. 29.835.000	Rp. 24.695.000		Rp. 24.695.000	Rp. 45.000.000,00
7	01	02	2		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Rp. 980.909.400	Rp. 8.133.612.430	Rp. 9.114.521.830	Rp. 1.600.867.800	Rp. 11.168.778.701	Rp. 12.769.646.501	Rp. 6.500.000.000,00
7	01	02	2	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Rp. 359.909.400	Rp. 6.699.149.931	Rp. 7.059.059.331	Rp. 979.867.800	Rp. 9.734.316.202	Rp. 10.714.184.002	Rp. 4.000.000.000,00
7	01	02	2	0002	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	Rp. 621.000.000	Rp. 1.434.462.499	Rp. 2.055.462.499	Rp. 621.000.000	Rp. 1.434.462.499	Rp. 2.055.462.499	Rp. 2.500.000.000,00
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp. 1.235.979.250	Rp. 1.030.000	Rp. 1.237.009.250	Rp. 1.175.296.250	Rp. 1.030.000	Rp. 1.176.326.250	Rp. 815.000.000,00
7	01	03	2		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Rp. 1.235.979.250	Rp. 1.030.000	Rp. 1.237.009.250	Rp. 1.175.296.250	Rp. 1.030.000	Rp. 1.176.326.250	Rp. 815.000.000,00
7	01	03	2	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Rp. 60.406.250		Rp. 60.406.250	Rp. 60.406.250		Rp. 60.406.250	Rp. 65.000.000,00
7	01	03	2	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp. 1.175.573.000	Rp. 1.030.000	Rp. 1.176.603.000	Rp. 1.114.890.000	Rp. 1.030.000	Rp. 1.115.920.000	Rp. 750.000.000,00
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp. 136.244.800		Rp. 136.244.800	Rp. 98.603.600		Rp. 98.603.600	Rp. 200.000.000,00
7	01	04	2		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp. 136.244.800		Rp. 136.244.800	Rp. 98.603.600		Rp. 98.603.600	Rp. 200.000.000,00
7	01	04	2	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Rp. 136.244.800		Rp. 136.244.800	Rp. 98.603.600		Rp. 98.603.600	Rp. 200.000.000,00
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rp. 186.040.200		Rp. 186.040.200	Rp. 158.322.600		Rp. 158.322.600	Rp. 240.000.000,00
7	01	05	2		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Rp. 186.040.200		Rp. 186.040.200	Rp. 158.322.600		Rp. 158.322.600	Rp. 240.000.000,00
7	01	05	2	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemerintahan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Rp. 154.776.200		Rp. 154.776.200	Rp. 130.606.600		Rp. 130.606.600	Rp. 200.000.000,00
7	01	05	2	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Rp. 31.264.000		Rp. 31.264.000	Rp. 27.716.000		Rp. 27.716.000	Rp. 40.000.000,00
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp. 98.469.800		Rp. 98.469.800	Rp. 98.099.800		Rp. 98.099.800	Rp. 150.000.000,00
7	01	06	2		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 98.469.800		Rp. 98.469.800	Rp. 98.099.800		Rp. 98.099.800	Rp. 150.000.000,00
7	01	06	2	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Rp. 98.469.800		Rp. 98.469.800	Rp. 98.099.800		Rp. 98.099.800	Rp. 150.000.000,00
Jumlah						**Rp. 10.553.014.516**	**Rp. 8.438.402.330**	**Rp. 18.991.417.246**	**Rp. 10.729.198.437**	**Rp. 11.630.248.601**	**Rp. 22.359.447.038**	**Rp. 17.315.000.000,00**

BAB IV
RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Kecamatan Solear merupakan salah satu unsur Pemerintah Kabupaten Tangerang, pada pelaksanaan Pembangunan, Pemerintahan, Sosial dan Kemasyarakatan, proses Perencanaannya mengacu pada "Juklak dan Juknis" yang telah ditetapkan berdasarkan Perda dan Perbub Kabupaten Tangerang.

Pada Tahun 2025 Kecamatan Solear memiliki Anggaran Perubahan sebesar Rp. 22.359.447.037, yang terdiri dari belanja operasional sebesar Rp. 10.729.198.437 dari sebelumya. 10.553.014.916 **naik sebesar Rp.** 176.183.521 **atau 1.66 %** dan belanja modal sebesar Rp. 11.630.248.601 **dari sebelumnya Rp.** 8.438.402.330 **atau nail sebesar Rp.** 3.191.846.271 **atau 37.82%**. Adapun rincian kegiatan Perubahan untuk tahun 2025 adalah sebagai berikut : yang mengalami perubahan anggaran adalah sebagai berikut :

Tabel Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Solear Tahun 2025

Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening			Uraian	Jumlah		Bertambah / (Berkurang)	
				Sebelum	Sesudah	(Rp.)	%
5			**BELANJA DAERAH**				
5	**1**		**BELANJA OPERASI**	**Rp. 10.553.014.916**	**Rp. 10.729.198.437**	**Rp. 176.183.521**	**1.66 %**
5	1	01	Belanja Pegawai	Rp. 5.284.034.466	Rp. 5.002.468.781	(Rp. 281.565.685)	5.32 %
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 5.268.980.450	Rp. 5.726.729.656	Rp. 457.749.206	8.68 %
5	**2**		**BELANJA MODAL**	**Rp. 8.438.402.330**	**Rp. 11.630.248.601**	**Rp. 3.191.846.271**	**37.82 %**
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp. 304.789.900	Rp. 461.469.900	Rp. 156.680.000	51.4 %
5	2	04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp. 8.133.612.430	Rp. 11.168.778.701	Rp. 3.035.166.271	37.31 %
			Jumlah Belanja	**Rp. 18.991.417.246**	**Rp. 22.359.447.038**	**Rp. 3.368.029.792**	**17.73 %**
			Total Surplus / (Defisit)	**(Rp. 18.991.417.246)**	**(Rp. 22.359.447.038)**	**(Rp. 3.368.029.792)**	**17.73 %**

Realisasi Anggaran untuk Tahun 2025 Semester Triwulan I untuk Belanja Operasi mulai dari Bulan Januari sampai dengan bulan Maret 2025 mencapai Rp. 2.139.452.588 atau 20.82 % dari pagu anggaran sebesar Rp. 10.274.161.065,70 sedangkan untuk Belanja Modal Realisasi mencapai Rp. 1.198.543.172 atau 14.20 % dari pagu anggaran sebesar Rp. 8.438.402.330,30. Dari pagu anggaran sebesar Rp. 18.712.563.396 Kecamatan Solear mampu merealisasikan penyerapan anggaran sebesar Rp. 3.337.995.760 atau 17.84 %. Adapun table realisasi anggaran Kecamatan Solear Tahun 2025 Triwulan I adalah sebagai berikut.

Kode Rekening	Uraian	Pagu Anggaran	Jumlah Realisasi (Rp.)			Lebih / (Kurang)	
			S/D Periode Lalu	Periode Ini	Total	(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 3	8 = 6 : 3
5	**BELANJA DAERAH**						
5.1	**BELANJA OPERASI**	**10.274.161.065,70**	**0,00**	**2.139.452.588,00**	**2.139.452.588,00**	**(8.134.708.477,70)**	**20,82**
5.1.01	Belanja Pegawai	5.284.034.465,70	0,00	1.195.745.184,00	1.195.745.184,00	(4.088.289.281,70)	22,63
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.990.126.600,00	0,00	943.707.404,00	943.707.404,00	(4.046.419.196,00)	18,91
5.2	**BELANJA MODAL**	**8.438.402.330,30**	**0,00**	**1.198.543.172,00**	**1.198.543.172,00**	**(7.239.859.158,30)**	**14,20**
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	304.789.900,00	0,00	45.858.000,00	45.858.000,00	(258.931.900,00)	15,05
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	8.133.612.430,30	0,00	1.152.685.172,00	1.152.685.172,00	(6.980.927.258,30)	14,17
	JUMLAH BELANJA DAERAH	**18.712.563.396,00**	**0,00**	**3.337.995.760,00**	**3.337.995.760,00**	**(15.374.567.636,00)**	**17,84**
	SURPLUS / (DEFISIT)	**(18.712.563.396,00)**	**0,00**	**(3.337.995.760,00)**	**(3.337.995.760,00)**	**15.374.567.636,00**	**17,84**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	**(18.712.563.396,00)**	**0,00**	**(3.337.995.760,00)**	**(3.337.995.760,00)**	**15.374.567.636,00**	**17,84**

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Solear Tahun 2025 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA). Penetapan Skala Prioritas kegiatan sebagaimana telah diuraikan pada bab terdahulu adalah sangat menentukan dalam menunjang optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan terutama terhadap kewenangan-kewenangan yang telah dilimpahkan ke kecamatan.

Penetapan rencana kerja sebagaimana dimaksud adalah suatu proses pelaksanaan program/kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya, yaitu Tahun 2024 dalam operasionalnya tidak terlepas dari permasalahan yang timbul setelah evaluasi terhadap capaian kinerja kegiatan dan kinerja sasaran tidak berpengaruh besar baik secara Kuantitatif dan Kualitatif program kegiatan. Namun demikian permasalahan yang timbul tersebut tetap dijadikan acuan dalam penetapan rencana kerja Tahun 2025.

Rencana kerja merupakan tolok ukur penting dari suatu sistemakuntabilitas kinerja. Perencanaan kerja akan mengilhami tugas pokok dan fungsi pada Kecamatan Solear di masa yang akan datang secara terencana dan terkoordinasi. Dengan demikian akan tercipta keinginan untuk meningkatkan kinerja dan fokus perbaikan di masa yang akan datang.

Pelaksanaan pembangunan di bidang Pemerintahan, Pembangunan, Ekonomi dan Pembinaan Kehidupan Kemasyarakatan dalam wilayah kecamatan, memerlukan perhatian khusus dari semua pihak yang terkait dengan persepsi yang sama, agar dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan. Masyarakat juga dilibatkan dalam pengawasan dan pemeliharaan setiap kegiatan pembangunan agar dapat berdaya guna sesuai yang direncanakan.

Kecamatan Solear sebagai salah satu Kecamatan di Kabupaten Tangerang, akan berupaya seoptimal mungkin untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tangerang. Untuk mendukung hal tersebut, Kecamatan Solear menyusun Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program dan kegiatan Tahun 2025. Rencana Kerja Kecamatan Solear yang telah disusun ini merupakan komitmen dari pimpinan dan seluruh staf Kecamatan Solear demi terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

58. Kecamatan Mekar Baru

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana kerja (Renja) Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan OPD yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun oleh masyarakat yang diakomodir melalui kegiatan Anggaran Biaya Tahun 2024. Penyusunan Renja Kecamatan Mekar Baru merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, disusun menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta TataCara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Lebih lanjut, Rencana kerja merupakan penjabaran operasionalisasi dari dokumen Rencana strategis OPD yang telah disusun melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah. Rencana kerja menjadi perangkat penting dalam menjelaskan serangkaian tindakan yang bersifat operasional yang perlu dilakukan dalam jangka pendek untuk mencapai tujuan dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra OPD.

Rencana kerja merupakan instrument penting bagi OPD dalam mengartikulasikan secara langsung tugas dan perannya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan isu-isu strategis dan pendekatan dalammemecahkan masalah. Rencana kerja OPD secara sistematis menggambarkan apa yang seharusnya dilakukan dan bagaimana mencapainya, sehingga memudahkan dalam mengukur target capaian kinerja dalam setiap tahapan pembangunan daerah. Melalui rencana kerja, masing-masing OPD dan pemangku kepentingan lain dapat menetapkan alternatif program atau kegiatan yang secara langsung berkaitandengan pemenuhan kebutuhan pelayanan dan strategi intervensi yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Kecamatan Mekar Baru sebagai salah satu OPD di Pemerintah Kabupaten Tangerang juga mempunyai kewajiban menyusun rencana kerja sebagai dokumen perencanaan pembangunan Kecamatan Mekar Baru sekaligus sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan pada tahun 2024. Penyusunan rencana kerja Kecamatan Mekar Baru harus mempertimbangkan keintegrasian, keselarasan dan sinergitas dengan berbagai dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Ini perlu dilakukan agar tujuan dan sasaran pembangunan yang dirumuskan dapat lebih terarah, terpadu, saling mendukung, yang pada gilirannya seluruh tujuan dan sasaran yang terkait dengan urusan perencanaan dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif.

Rencana kerja Kecamatan Mekar Baru Tahun 2025, merupakan turunan dari Rencana Strategis Kecamatan Mekar Baru Tahun 2024-2026. Tahun 2025 merupakan tahun pertama dari Renstra Kecamatan Mekar Baru. Terdapat enam program pada Tahun 2024, yaitu program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota, program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, program

pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum, program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa, serta Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum. Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Keluarahan adalah sebagai berikut:

1. Susunan Organisasi
   a. Camat.
   b. Sekretariat, terdiri dari :
      1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
      2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

   c. Seksi Pemerintahan;
   d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
   e. Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat
   f. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
   g. Seksi Pelayanan
   h. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.

2. Tugas Perangkat Daerah
   a. Camat

      Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berdudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, mempunyai tugas:
      1) Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
      2) Mengoordinasikankegiatan pemberdayaan masyarakat
      3) Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertibanumum
      4) Mengoordinasikan penerapan dan penegakan perda dan peraturan bupati;
      5) Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum
      6) Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yangdilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
      7) Membina dan mengawasai penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan
      8) Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yangtidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan; dan
      9) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan

      Dalam melaksanakan tugasnya Camat dibantu oleh Sekretariat, para Kasi dan Kelurahan.

   b. Sekterariat
      1) Sekretaris Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada camat
      2) Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pembinaan daan pengendalian kegiatan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan program kerja, keuangan, serta pengkoordinasian tugas satuan organisasi di lingkungan kecamatan.
      3) Dalam melaksanakan tugasnya dibantu Kasubag Umum dan Kepegawaian,juga Kasubag Perencanaan dan Keuangan

c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

1) Subbagian umum dan kepegawaian dipimpin oleh kepala subbagian umum dan kepegawaian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada sekretaris kecamatan
2) Subbagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas melakukan kegiatanpelayanan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, kerumah tanggaan, dan kehumasan di lingkungan kecamatan.
3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepala subbagian umum dan kepegawian mempunyai rincian tugas:
   a) Merencanakan kegiatan umum dan kepegawaian program kerja operasional pelayanan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, kerumahtanggaan, dan informasi kehumasan di kecamatan
   b) Membimbing pelaksanaan kegiatan umum yang meliputi : surat menyurat, penggandaan, pengiriman, pengarsipan, tata naskah dinas, Inventarisasi Aset dan Persediaan Pengadaan barang dan jasa, Pendistribusian, Stock Opname, fasilitasi pengelola informasi dan dokumen (PID), perjalanan dinas dan pemeliharaan barang-barang Inventaris ;
   c) Membimbing pelaksanaan kegiatan kepegawaian meliputi : layanan administrasi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala (KGB), Daftar Urut Kepangkatan (DUK), data pegawai, Katu Pegawai (karpeg), Karis/Karsu, tunjangan anak/keluarga dan jabatan, asuransikesehatan, tabungan pensiun, tabungan perumahan, pensiun, usulan formasi pegawai, usulan izin belajar, usulan diklat pegawai, usulan pemberian penghargaan dan tanda kehormatan, penilaian angka kreditjabatan fungsional, teguran disiplin pegawai, usulan cuti pegawai, usulan perpindahan/cuti pegawai, pengelolaan standar kompetensi pegawai (SKP).
   d) Membimbing pelaksanaan kegiatan umum dan kepegawaian yang meliputi: pembinaan dan pengembangan pegawai kecamatan, pembinaan dan supervisi pengelolaan dan pendayagunaan aset daerahyang dikelola oleh kelurahan, urusan rumah tangga dan informasi kehumasan di kecamatan.
   e) Membagi tugas pelaksanaan kegiatan umum meliputi: surat menyurat, penggandaan, pengiriman, pengarsipan, tata naskah dinas, Inventarisasi Aset dan Persediaan Pengadaan barang dan jasa, Pendistribusian, Stock Opname, fasilitasi pengelola informasi dan dokumen (PID), perjalanan dinas dan pemeliharaan barang-barang Inventaris.
   f) Membagi tugas pelaksanaan pelayanan administrasi kepegawian dilingkup kecamatan yang meliputi layanan administrasi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala (KGB), Daftar Urut Kepangkatan (DUK),data pegawai, Kartu Pegawai (karpeg), Karis/Karsu, tunjangan anak/keluarga dan jabatan, asuransi kesehatan, tabungan pensiun,tabungan perumahan, pensiun, usulan formasi

pegawai, usulan izin belajar, usulan diklat pegawai, usulan pemberian penghargaan dan tanda kehormatan, penilaian angka kredit jabatan fungsional, teguran disiplin pegawai, usulan cuti pegawai, usulan perpindahan/cuti pegawai, pengelolaan standar kompetensi pegawai (SKP);

g) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan umum dan kepegawaian dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya;
h) Membuat laporan pelaksanaan kegiatan umum dan kepegawaian yang meliputi: laporanpenyusunan Rencana Kebutuhan Barang, administrasi aset daerah di lingkup kecamatan, penilaian prestasi kerja pegawai kecamatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
i) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang dierikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

d. Subbagian Perencanaan dan Keuangan

1) Subbagian perencanaan dan keuangan dipimpin oleh kepala subbagian perencanaan dan keuangan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada sekretaris kecamatan
2) Subbagian perencanaan dan keuangan mempunyai tugas melakukan kegiatan penyusunan rencana dan program kerja kecamatan, serta pengelolaan administrasi dan pengelolaan keuangan kecamatan.
3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud kepala subbagian perencanaan dan keuangan mempunyai rincian tugas:
   a) Merencanakan kegiatan Perencanaan dan keuangan;
   b) Membimbing pelaksanaan kegiatan perencanaan yang meliputi: RPJMD, Rencana Strategis, Rencana Kerja, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja, Penyusunan Dokumen RKA/DPA, RRKA/DPPA, Forum SKPD, Monitoring dan Evaluasi, pelaksanaan pengembangan e-goverment, serta laporankinerja Instansi Pemerintah. Melakukan pengoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan kecamatan meliputi Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), dan Penetapan Kinerja (PK);
   c) Membimbing pelaksanaan kegiatan administrasi keuangan yang meliputi: Pengajuan Surat Membayar Uang Persediaan, Ganti Uang, Tambahan Uang, LS Bendahara, LS Pihak Ketiga dan Ganti Uang Nihil, Pencairan, Pencatatan, Pembukuan, serta Pelaporan Pertanggungjawaban Anggaran;
   d) Membagi tugas pelaksanaan kegiatan administrasi perencanaan yang meliputi: RPJMD, Rencana Strategis, Rencana Kerja, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja, Penyusunan Dokumen RKA/DPA, RRKA/DPPA, Fasilitasi Perencanaan SKPD, Monitoring dan Evaluasi, eReporting, Reviu Penyerapan Anggaran, Data Pembangunan SKPD serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

e) Membagi tugas pelaksanaan kegiatan administrasi keuangan yang meliputi: Pengajuan Surat Membayar Uang Persediaan, Ganti Uang, Tambahan Uang, LS Bendahara, LS Pihak Ketiga dan Ganti Uang Nihil, Pencairan, Pencatatan, Pembukuan, serta Pelaporan Pertanggungjawaban Anggaran;
f) Mengevaluasi pelaksanaa kegiatan yang terkait dengan perencanaan dan keuangan dan menginventarisasi permasalahan di lingkuptugasnya;
g) Membuat laporan pelaksanaan kegiatan perencanaan dan keuangan yang meliputi : Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas(LPE) dan Catatan AtasLaporan Keuangan (CALK), dan RPJMD, Rencana Strategis, Rencana Kerja, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja, Penyusunan Dokumen RKA/DPA, RRKA/DPPA, Fasilitasi Perencanaan SKPD, Monitoring dan Evaluasi, eReporting, Reviu Penyerapan Anggaran, Data Pembangunan SKPD, pelaksanaan pengembangan e-goverment serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
h) Melaksanakan tugas kedinasana lain yang diberikan oleh atasan terkaitdengan tugas dan fungsinya.

e. Seksi Pemerintahan

1) Seksi pemerintahan dipimpin oleh kepala seksi pemerintahan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada camat melalui sekretaris kecamatan.
2) Seksi pemerintahan mempunyai tugas melakukan penyusunan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan umum, pengoordinasian kegiatanpemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan, serta pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa dan kelurahan.
3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud kepala seksi pemerintahan mempunyai rincian tugas:
   a) Merencanakan kegiatan pemerintahan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
   b) Membimbing pelaksanaan kegiatan pemerintahan umum yang meliputi: pengelolaan profil dan monografi desa/kelurahan serta kecamatan, perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, penyusunan peraturan Desa dan peraturan kepala Desa;
   c) Membimbing pelaksanaan kegiatanfasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi tata pemerintahan desa dan kelurahan, fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa, fasilitasi pelaksanaan tugas kepala Desa/lurah dan perangkat desa/kelurahan, fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala Desa, fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa, fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan, memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif di desa dan kelurahan, memfasilitasi kerja sama antar-Desa dan kerja sama Desa

dengan pihak ketiga.

d) Membagi tugas pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan pemerintahan umum.
e) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pemerintahan umumyang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa), Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) dan Anggaran Pendapatan danBelanja Desa (APB Desa);
f) Membuat laporan pelaksanaan kegiatan pemerintahan umum;
g) Pengumpulan bahan untuk camat merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa;
h) Mengumpulkan bahan dan melaksanakan kebijakan camat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan/didelegasikan bupati kepada camat sesuai dengan lingkuptugasnya
i) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

f. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

1) Seksi pemberdayaan masyarakat dipimpin oleh kepala seksi pemberdayaan masyarakat berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan
2) Seksi pemberdayaan masyarakat mempunyai tugas melakukan penyusunan kegiatan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial di kecamatan.
3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud kepala seksi pemberdayaan masyarakat mempunyai rincian tugas:
   a) Merencanakan kegiatan yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat;
   b) Membimbing pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat yang melputi: fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa dan kelurahan,
   c) Membimbing pelaksanaan kegiatan pembinaan danpengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan,
   d) Membimbing pelaksanaan kegiatan penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah penyakit skala kecamatan, masalah pencemaran lingkungan, serta masalah kesejahteraan sosial di kecamatandan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah/instansi terkait;
   e) Membagi tugas pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat
   f) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan pemberdayaan masyarakatdi wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta dan menginventarisasipermasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatifpemecahannya;
   g) Membuat laporan pelaksanaan kegiatan yang terkait

dengan pemberdayaan masyarakat;

h) Mengumpulkan bahan dan melaksanakan kebijakan camat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan/didelegasikan bupati kepada camat sesuai dengan lingkuptugasnya
i) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya

g. Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Mayarakat

1) Seksi ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat dipimpin oleh kepala Seksi ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan.
2) Seksi ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat mempunyai tugas melakukan penyusunan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, serta penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di kecamatan.
3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud kepala seksi ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat mempunyai rincian tugas:
   a) Merencanakan kegiatan yang terkait dengan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat; membimbing pelaksanaan kegiatan tanggap bencana lingkup kecamatan
   b) Membimbing pelaksanaan kegiatan fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di desa dan kelurahan, membimbing anggota Linmas yang berada di wilayah kerja kecamatan
   c) Membimbing pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan ketenteramandan ketertiban umum di wilayah kecamatan yang meliputi koordinasi dengan kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia, serta pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan.
   d) Membagi tugas pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat di desa dan kelurahan
   e) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya.
   f) Membuat laporan pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat;
   g) Mengumpulkan bahan dan melaksanakan kebijakan camat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan/didelegasikan bupati kepada camat sesuai dengan lingkuptugasnya
   h) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya

h. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

1) Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dipimpin oleh kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan

Pemerintahan Desa yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan

2) Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa mempunyai tugas melakukan penyususnan kegiatan bidang perekonomian dan pembangunan serta pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di kecamatan.
3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa rincian tugas
   a) Merencanakan kegiatan yang terkait dengan perekonomian dan pembangunan;
   b) Membimbing pelaksanaan kegiatan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang meliputi koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya dibidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
   c) Membimbing dan mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dankecamatan
   d) Membagi tugas pelaksanaan program kegiatan yang terkait dengan perekonomian dan pembangunan;
   e) Membuat laporan pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan perekonomian dan pembangunan;
   f) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan perekonomian dan pembangunandan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya Mengumpulkan bahan dan melaksanakan kebijakan camat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan/didelegasikan bupati kepada camat sesuai dengan lingkup
   g) tugasnya yang meliputi bidang ekonomi, pekerjaan umum danpembanguna
   h) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya

i. Seksi Pelayanan

1) Seksi pelayanan dipimpin oleh kepala seksi pelayanan yang berkedudukandibawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan
2) Seksi pelayanan mempunyai tugas melakukan penyususnan kegiatan pelayanan publik lingkup bidang perizinan dan non perizinan sesuai dengan kewenangan kecamatan.
3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud kepala seksi pelayanan mempunyai rincian tugas:
   a) Merencanakan kegiatan yang terkait dengan pelayanan
   b) Membimbing pelaksanaankegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan
   c) Membimbing pelaksanaan kegiatan percepatan pencapaian

standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan, pendistribusian dan pengumpulan formulir pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat yang berasal dari Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan pelayanan public

d) Membimbing penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi terkait lainnya,
e) Membimbing pelaksanakan standar pelayanan publik dan standar operasioanal prosedur pelayanan, pengaduan/keluhan dari masyarakat;
f) Membagi tugas pelaksanaan program kegiatan yang terkait dengan pelayanan yang meliputi;
g) Membuat laporan pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan pelayanan;
h) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan pelayanan dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya yang meliputi evaluasi terhadap kinerja pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
i) Mengumpulkan bahan dan melaksanakan kebijakan camat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan/didelegasikan bupati kepada camat sesuai dengan lingkuptugasnya;
j) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya

j. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu

Kelompok jabatan fungsional terdiri dari beberapa jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang tugasnya. Kelompok jabatan fungsional dalam pelaksanaan tugas pokok berpedoman kepada peraturan dan perundang- undangan yang berlaku. Bertugas sebagai pelaksanaan kegiatan kecamatan sesuai dengan kebutuhan. Kelompok jabatan fungsional dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada camat.

Terdapat 1 jabatan fungsional tertentu di Kecamatan Mekar Baru, dalam pelaksanaan tugasnya jabatan fungsional tertentu didasarkan atas keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri yang kenaikan pangkatnya didasarkan pada angka kredit. Jabatan fungsional tertentu pada Kecamatan Mekar Baru yaitu:

1) Jabatan Fungsional Pranata Komputer Ahli Pertama

Berdasarkan Peraturan Menpan-RB Nomor 32 tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pranata Komputer adalah jabatan yang mempunyai lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan sistem teknologi informasi berbasi komputer.Adapun rincian tugas Jabatan Fungsional Pranata Komputer Ahli Pertamaadalah sebagai berikut:

a) Mengusulkan Kenaikan Gaji Berkala pegawai agar tepat waktu;
b) Mengusulkan Kenaikan Pangkat Pegawai agar tepat waktu;
c) Merekap Absensi Finger Print Membuat Surat Keterangan untuk mendapatkan Tunjangan Keluarga

(SKUMPTK);
d) Membuat Data Kebutuhan Pegawai (Bezzeting) sesuai kebutuhanorganisasi;
e) Mengelola Surat Masuk atau Keluar;
f) Melakukan Manipulasi Data;
g) Membuat Obyek Multimedia Kompleks Dengan Peranti Lunak;
h) Menyiapkan Peralatan Video Conference (Vicon/Streaming), Monitoring Peralatan berupa Audio, Video, Dan Perangkat Jaringan serta Mengatur Layout; Melakukan Instalasi/Upgrade Dan Konfigurasi Sistem Operasi/Aplikasi;
i) Melakukan backup atau pemulihan data;
j) Monitoring/maintenance Jaringan Internet;
k) Membuat laporan pelaksanaan dan hasil kegiatan kepada atasan;
l) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik tertulis maupun lisan.

3. Fungsi Perangkat Daerah

Camat mempunyai fungsi pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian Urusan Pemerintahan Daerah, meliputi:

a. Penyiapan rumusan kebijakan teknis pelaksanaan pemberdayaan masyarakat,penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan penegakan Perda dan Peraturan Bupati, Pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegaiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan, penyelenggaraan kegiatan desa dan Kelurahan dan pelayanan publik yang menjadi ruang lingkup tugasnya di Kecamatan
b. Penyiapan rencana dan program kegiatan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan penegakan Perda dan Peraturan Bupati, Pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegaiatan pemerintahan yang dilakukan olehperangkat daerah di tingkat Kecamatan, penyelenggaraan kegiatan desa dan Kelurahan dan pelayanan publik yang menjadi ruang lingkup tugasnya di Kecamatan
c. Penyiapan Koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan penegakan Perda dan Peraturan Bupati, Pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegaiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan, penyelenggaraan kegiatan desa dan Kelurahan dan pelayanan publik yang menjadi ruang lingkup tugasnya di Kecamatan.
d. Penyiapan Pengawasan dan Pengendalian kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapanpenegakan Perda dan Peraturan Bupati, Pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegaiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan, penyelenggaraan kegiatan desa dan Kelurahan dan pelayanan publik yang menjadi ruang lingkup tugasnya di Kecamatan

e. Penyiapan bimbingan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan penegakan Perda dan Peraturan Bupati, Pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegaiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan, penyelenggaraan kegiatan desa dan Kelurahan dan pelayanan publik yang menjadi ruang lingkup tugasnya di Kecamatan

Pengelolaan administrasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan penegakan Perda dan Peraturan Bupati, Pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegaiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan, penyelenggaraan kegiatan desa dan Kelurahan dan pelayanan publik yang menjadi ruang lingkup tugasnya di Kecamatan.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana kerja Kecamatan Mekar Baru Tahun 2025 mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
   tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 09 Tahun 2009 tentang Pedoman Kabupaten Tangerang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tangerang Tahun 2005-2025;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2013-2018;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 113 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang;
13. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 39 Tahun 2023 tentang RencanaPembangunan Daerah Tahun 2024-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Penyusunan Rencana kerja Kecamatan Mekar Baru dimaksudkan sebagaiacuan atau pedoman bagi seluruh pejabat dan pelaksana Kecamatan Mekar Baru dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan.

b. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana kerja Kecamatan Mekar Baru adalah agar pelaksanaan semua kegiatan bisa sesuai dengan jadwal, anggaran, sasaran sehingga secara keseluruhan berdampak pada peningkatan kinerja Kecamatan Mekar Baru di Tahun 2024.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistimatika penulisan dari Rencana Kerja Kecamatan Mekar Baru Tahun 2025 sebagaimana diatur dalam Permendagri 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut ;

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1. Latar belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2024
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2024 dan CapaianRenstra PD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD
3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAHBAB V PENUTUP

4.1. Catatan Penting dalam Penyusunan Renja
4.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan
4.3 Rencana Tindak LanjutLampiran-Lampiran

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Capaian Renstra PD

Kecamatan Mekar Baru pada Tahun Anggaran 2024 mempunyai 6 program, 12 kegiatan dan 31 sub kegiatan, kecamatan Mekar Baru mendapatkan Pagu anggaran Sebelum Perubahan sebesar Rp. 14.153.272.588. Adapun Rincian Anggaran Belanja untuk Tahun 2024 pada Kecamatan Mekar Baru dapat dilihat dibawah ini:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota dengan Anggaran sebesar Rp. 9.024.399.593 dengan jumlah kegiatan sebanyak 6 kegiatan dan 21 sub kegiatan, indikator kinerja program yaitu Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan dari target 100 % dan yang Baru tercapai di tahun berjalan 2024 capaian target sebesar 100 % serta serapan anggaran Triwulan IV sebesar Rp. 8.840.695.974 atau 97,96 %.
   - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
   - Administrasi Umum Perangkat Daerah
   - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintah Desa dengan anggaran sebesar Rp. 184.061.250 dengan jumlah kegiatan sebanyak 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan, indikator kinerja program yaitu Prosentase desa dengan laporan keuangan baik dari target 67 % dan capaian target sampai dengan Triwulan IV ini sebesar Rp. 183.967.242 atau 99,95 %.
   - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
   - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
3. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan anggaran sebesar Rp. 9.147.190.619 dan Realiasi Pada Triwulan IV Sebesar Rp. 9.090.637.842 dengan jumlah kegiatan sebanyak 2 kegiatan dan 2 sub kegiatan, indikator kinerja program yaitu Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar dari target 63% dan capaian target Triwulan IV sebesar 85 % serta serapan anggaran sebesar 85.52 %, dan Indikator Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara sesuai dengan standar dari target 58% dan capaian target Triwulan IV sebesar 80 % serta serapan anggaran sebesar 99,38%
   - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
   - Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
4. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan anggaran sebesar Rp. 1.382.723.620 dan Realiasi Penyerapan Triwulan IV Sebesar Rp. 1.381.377.620 dengan jumlah kegiatan sebanyak 1 kegiatan dan 2 Sub. kegiatan, indikator kinerja

program yaitu Prosentase kelompok masyarakatyang mendapat pembinaan/pemberdayaan dari target 58 % dan capaian target Pada Triwulan IV sebesar 100 % serta serapan anggaran sebesar 99,90%.

- Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa
- Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

5. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan anggaran sebesar sebesar Rp. 219.684.390 dan Realiasai Triwulan IV Sebesar Rp. 219.635.390 dengan jumlah kegiatan sebanyak 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan, indikator kinerja program yaitu Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti dari target 100 % dan capaian target Pada Triwulan IV sebesar 40 % serta serapan anggaran sebesar 99,98%.

   Pada program ini kegiatan yang kinerjanya tercapai 100% adalah:

   - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

6. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan anggaran sebesar sebesar Rp. 461.411.250 dan Realiasai Triwulan IV Sebesar Rp. 461.361.250 dengan jumlah kegiatan sebanyak 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan, indikator kinerja program yaitu Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti dari target 70 % dan capaian target Pada Triwulan IV sebesar 100% serta serapan anggaran sebesar 99,99 %.

   Pada program ini kegiatan yang kinerjanya tercapai 100% adalah:

   - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

Berdasarkan data diatas dapat diuraikan masing-masing sub kegiatan sebagaiberikut :

1. **Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**
   Setiap SKPD diwajibkan menyusun suatu dokumen perencanaan yaitu rencana kegiatan dan anggaran pada apbd untuk tahun selanjutanya maupun di akhir tahun, hal tersebut dilakukan guna mendukung program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selanjutnya yaitu untuk mempercepat proses pembangunan di daerah dan untuk mengembangkan sertamemberdayakan segala bentuk potensi yang ada di wilayah kerja masing- masing SKPD.
2. **Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
   Setiap SKPD diwajibkan menyusun suatu dokumen perencanaan yang akan dilakukan yaitu basis data/selayang pandang/profil SKPD, buku profil ini terasa sangat besar manfaatnya terutama dalam rangka evaluasi kegiatan sejauh mana hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai.
3. **Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD**
   Demi lancarnya kegiatan di Kecamatan Mekar Baru dan untuk tertib administrasi dalam pelaporan maka SKPD berkewajiban untuk melakukan penyusunan laporan capaian kinerja. Hal tersebut perlu didukung dengan disediakannya anggaran dalam menyusun laporan tersebut.
4. **Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**
   Demi lancarnya kegiatan di Kecamatan Mekar Baru dan untuk tertib administrasi dalam pelaporan maka SKPD berkewajiban untuk melakukan Penyediaan Gaji dan Tunjangan.

5. **Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan**
   Penyusunan laporan keuangan akhir tahun setiap berakhirnya tahun anggaran. Hal tersebut perlu didukung dengan disediakannya anggaran dalam menyusun laporan tersebut.
6. **Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya**
   Untuk Kedisiplinan Pegawai dan Untuk Meningkatkan inerja Pegawain Maka Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapananya Sangat dibutuhkan Oleh Seluruh Pegawaian PNS dan Non PNS di Lingkup Kantor Kecamatan Mekar Baru.
7. **Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan**
   pegawai dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas dan sumber daya manusia di kecamatan sehingga pegawai mampu melaksanakan tugas dengan efektif dan efisien.
8. **Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor**
   Untuk memenuhi kebutuhan penerangan dan untuk meningkatkan kinerja pegawai maka penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor sangat dibutuhkan didalam kegiatan operasional.
9. **Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**
   Demi lancarnya Kegiatan di Kecamatan Mekar Baru maka perlu didukung dengan sarana dan prasarana yang baik, untuk itu peralatan dan perlengkapan kantor yang digunakan untuk bekerja para pegawai harus tetap diperhatikan agar tercipta kenyamanan dalam beraktifitas.
10. **Penyediaan Bahan Logistik Kantor**
    Penyediaan Logistik Kantor merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi setiap organisasi untuk melaksanakan suatu kegiatan.
11. **Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan**
    Demi lancarnya pelaksanaan administrasi perkantoran diperlukan alat pendukung dan kelengkapan perkantoran diantaranya penyediaan barang cetakan dan penggandaan sebagai salah satu fasilitasi perkantoran sehingga terselenggaranya administrasi perkantoran yang efisien dan menghasilkan output (hasil) yang baik.
12. **Fasilitasi Kunjungan Tamu**
    Dalam rangka meningkatkan pelayanan yang bersifat rutinitas di kecamatan melalui penyediaan makanan dan minuman rapat serta kunjungan tamu. kegiatan ini diarahkan agar terpenuhinya penyediaan makanan dan minuman rapat kantor maupun bagi tamu-tamu yang melakukan kunjungan kerja di kecamatan.
13. **Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**
    Untuk memenuhi kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran dan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta koordinasi dengan instansi terkait, maka Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi sangat dibutuhkan dalam kegiatan operasional perkantoran. Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dianggarkan untuk kegiatan di dalam kabupaten Tangerang dan di luar kabupaten Tangerang seperti Provinsi Banten, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat
14. **Penyediaan Peralatan Rumah Tangga**
    Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dimaksudkan agar

Tersedianya peralatan rumah Tangga Kantor untuk itu Peralatan Rumah Tangga Perlu di sediakan guna untuk tersedianya peralatan dan Kelengkapan Peralatan Rumah tangga.

15. **Penyediaan Jasa Surat Menyurat**
Dalam rangka mewujudkan lingkungan kecamatan yang tertib administrasi surat menyurat maka perlu dilakukan penyediaan jasa surat menyurat dengan menunjuk petugas satu orang pengelola kearsipan dilingkungan Kecamatan , Hal tersebut dimaksud sebagai upaya untukpengelolaan kearsipan yang tertata dengan baik.

16. **Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**
Untuk memenuhi kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran dan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta koordinasi dengan instansi terkait, maka Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Internet sangat dibutuhkan di dalam kegiatan operasional perkantoran.

17. **Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**
Maksud dari pelaksanaan kegiatan ini adalah tenaga jasa kebersihan dilingkungan Kecamatan. Dengan adanya kegiatan tersebut diharapkan dapat memenuhi kebutuhan tenaga jasa kebersihan yang dapat meningkatkan kebersihan di lingkungan kantor.

18. **Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan atau Lapangan**
Demi lancarnya kegiatan di kecamatan maka perlu didukung dengan sarana dan prasarana yang baik, untuk itu kendaraan yang digunakan oleh camat dan pegawai lainnya harus tetap diperhatikan, untuk itu diperlukan adanya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan di kecamatan agar kondisi kendaraan tersebut tetap layak digunakan dan taat membayar pajak agar kegiatan pelayanan di kecamatan tetap optimal.

19. **Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya**
Keberadaan peralatan kantor sangat penting untuk menunjang pekerjaan kantor. Dengan adanya peralatan kantor banyak pekerjaan yang dapat diselesaikan dengan waktu yang cepat dan dengan hasil yang memuaskan. Agar keberadaan peralatan kantor tetap bekerja dengan baik maka diperlukan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya.

20. **Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya**
Demi lancarnya Kkegiatan di Kecamatan Mekar Baru maka perlu didukung dengan sarana dan prasarana yang baik, untuk itu Terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang digunakan sebagai tempat bekerja para pegawai harus tetap diperhatikan agar tercipta kenyamanan dalam beraktifitas, oleh karena itu diperlukan adanya pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya agar kondisi gedung kantor dan bangunan lainnya tetap layak digunakan.

21. **Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan**
Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) adalah penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan yang proses

pengelolaannya, mulai dari permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat melalui satu loket pelayanan. Pengembangan Pelayanan Publik di Kabupaten Tangerang sudah dituangkan sesuai dengan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 84 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2016Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kabupaten Tangerang sehingga dapat memberikan jaminan, kepastian dan perlindungan bagi masyarakat dari penyalahgunaan wewenang, mewujudkan kepercayaan masyarakat atas terselenggaranya pelayanan publik yang baik, penyelenggaraan pelayanan publik secara terintegrasi danberkesinambungan dalam upaya memenuhi harapan dan tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik.

22. **Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum**

    Pemeliharaan sarana dan prasarana umum di Kecamatan Mekar Baru, Kabupaten Tangerang dimaksudkan untuk mewujudkan infrastruktur dalam kondisi prima guna mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah setempat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan akses dan mobilitas masyarakat dari dan menuju ke wilayah setempat, mendorong pengembangan kepariwisataan, mewujudkan layanan prima pemerintah kepada masyarakat dalam penyediaan infrastruktur, serta mewujudkan pemerataan pembangunan di Kecamatan.

23. **Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah PerencanaanPembangunan di Desa**

    Setiap proses penyusunan dokumen rencana pembangunan, memerlukan koordinasi antar instansi pemerintah dan partisipasi seluruh pelaku pembangunan, melalui suatu forum yang disebut sebagai Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang. Untuk menyusun rencana kerja kecamatan yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, perlu menyelenggarakan musrenbang ini yang bertujuan untuk mendapatkan keselarasan dan masukan dari semua pelaku pembangunan (stakehokders).

24. **Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan**

    Sub kegiatan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan dilaksanakan dengan maksud terlaksananya pembinaan masyarakat di kecamatan yang diharapkan akan dapat mendorong peran serta masyarakat sekitar dalam pembangunan, produktif, mandiri dan berdaya saing. Melalui kegiatan ini pula peran serta aktif segenap lapisan masyarakat dalam pembangunan ikut digalang dan ditingkatkan, sehingga diharapkan dapat lebih merata dan berkualitas dalam memikul beban dan tanggung jawab pembangunan.

25. **Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan**

    Ketentraman dan ketertiban merupakan kebutuhan dasar bagi semua orang sehingga pemerintah mempunyai kewajiban dalam pemenuhan kebutuhan dasar tersebut. Untuk mewujudkan situasi

dan kondisi ketentraman dan ketertiban lingkungan yang kondusif diperlukan perumusan kebijakan dan strategi untuk mengiplementasikannya. Kecamatan sebagai salah satu perangkat daerah Kabupaten Tangerang juga berkewajiban untuk menyusun rencana kebijakan di bidang ketentraman dan ketertiban. Untuk mencapai efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegitan tersebut tentu tidak lepas dari tugas umum dan fungsi kecamatan yang salah satunya adalah mengkoordinasikan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.

26. **Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa**
Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kecamatan tidak lagi merupakan satuan wilayah kekuasaan pemerintahan, melainkan sebagai satuan wilayah kerja atau pelayanan. Camat memiliki kewenangan untuk membina penyelenggaraan pemerintahan desa, membina dalam ketentuan ini adalah dalam bentuk fasilitasi pembuatan peraturan desa dan terwujudnya administrasi tata kelola pemerintahan yang baik. Fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa dan pembinaan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan administrasi desa sudah dilaksanakan pada setiap desa di kecamatan.

27. **Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa**
meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan berupa pembentukan lembaga kemasyarakatan. Tim Fasilitasi Kecamatan adalah tim yang dibentuk oleh Camat dengan tugas melakukan fasilitasi dan pemantauan pelaksanaan Perangkat Desa.

28. **Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.**
Pada pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Perlunya , pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional, penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah kabupaten untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan pelaksanaan semua Urusan

Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal Untuk pelaksanaan tugas tersebut di atas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sanggau didukung dua unit kerja yaitu unit kerja yang bersifat penunjang urusan pemerintahan dan bersifat tugas utama (lini). Yang bersifat penunjang urusan pemerintahan dilaksanakan pada unit Sekretariat. Sedangkan yang bersifat tugas lini dilaksanakan pada unit kerja Bidang.

29. **Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Di Kecamatan**

Pembentukan forum dan sekretariat forum koordinasi pimpinan kecamatan yang dikoordinatori oleh camat sesuai dengan ruang lingkup wilayah kerjanya ini, bertujuan untuk dapat menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum di kecamatan. Sehingga keberadaan Forkopimcam diharapkan benar-benar mampu mempercepat penyelesaian permasalahan urusan pemerintahan umum di kecamatan yang bersifat multidimensi dan memerlukan penanganan yang cepat

Tabel 2.1
REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA S/D 2024
KECAMATAN MEKAR BARU KABUPATEN TANGERANG

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Renstra SKPD Tahun 2024 (Akhir Priode Rensra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan Keluaran Kegiatan s/d 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah Tahun 2025 n-1	Perkiraan Relisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d 2025 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan**	**Persen**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun**	**Dokumen**	**50**	**10**	**10**	**10**	**100**	**13**	**13**	**100**
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	10	2	2	2	100	5	5	100
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	20	4	4	4	100	4	4	100
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	20	4	4	4	100	4	4	100
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah laporan keuangan**	**Dokumen**	**80**	**16**	**16**	**16**	**100**	**17**	**17**	**100**
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	70	14	14	14	100	14	14	100
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKP	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	5	1	1	1	100	2	2	100
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	5	1	1	1	100	1	1	100
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Jumlah laporan pembinaan pegawai**	**Dokumen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**#DIV/0!**	**2**	**2**	**100**
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jenis	0	0	0	0	#DIV/0!	5	5	100
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	0	0	0	0	#DIV/0!	100	100	100
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah**	**Dokumen**	**7**	**7**	**7**	**7**	**100**	**7**	**7**	**100**
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jenis	15	5	4	4	100	1	1	100
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jenis	63	22	14	14	100	5	5	100
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jenis	45	24	23	23	100	37	37	100

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Renstra SKPD Tahun 2024 (Akhir Priode Rensra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan Keluaran Kegiatan s/d 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah Tahun 2025 n-1	Perkiraan Relisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d 2025 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis	89	22	22	22	100	15	15	100
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jenis	35	9	9	9	100	9	9	100
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	3469	836	836	836	100	3112	3112	100
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1140	382	245	245	100	333	333	100
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah laporan jasa penunjang**	**Dokumen**	**3**	**3**	**3**	**3**	**100**	**3**	**3**	**100**
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	5	1	1	1	100	14	14	100
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	10	2	2	2	100	12	12	100
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	90	20	20	20	100	14	14	100
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah\laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Dokumen**	**4**	**4**	**4**	**4**	**100**	**7**	**7**	**100**
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	38	8	8	8	100	7	7	100
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	38	8	8	8	100	7	7	100
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	22	4	4	4	100	15	15	100
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	11	3	3	3	100	4	4	100
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar**	**Persen**	**58**	**55**	**58**	**58**	**100**	**60**	**60**	**100**
	Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara	**Persen**	**52**	**49**	**52**	**52**	**100**	**55**	**55**	**100**
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	**Jumlah laporan pelayanan**	**Dokumen**	**12**	**12**	**12**	**12**	**100**	**12**	**12**	**100**
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	laporan	12	12	12	12	100	12	12	100
Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	**Jumlah dokumen pemeliharaan**	**Persen**	**50**	**50**	**50**	**50**	**100**	**50**	**50**	**100**

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Renstra SKPD Tahun 2024 (Akhir Priode Rensra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan Keluaran Kegiatan s/d 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah Tahun 2025 n-1	Perkiraan Relisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d 2025 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	dokumen	50	50	50	50	100	63	63	100
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Persentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan**	**Persen**	**52**	**49**	**52**	**52**	**100**	**55**	**55**	**100**
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Jumlah laporan pemberdayaan**	**Dokumen**	**105**	**21**	**21**	**21**	**100**	**21**	**21**	**100**
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga	55	11	11	11	100	11	11	100
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	50	10	10	10	100	10	10	100
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti**	**Persen**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**Jumlah laporan gangguan trantibum**	**Dokumen**	**1**	**1**	**1**	**1**	**100**	**5**	**5**	**100**
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	laporan	25	5	5	5	100	5	5	100
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**Persentase tertib administrasi pemerintahan desa**	**Persen**	**62**	**58**	**62**	**62**	**100**	**65**	**65**	**100**
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**	**Dokumen**	**1**	**1**	**1**	**1**	**100**	**16**	**16**	**100**
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	40	8	8	8	100	8	8	100
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	0	0	0	0	#DIV/0!	8	8	100
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti**	**Persen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**#DIV/0!**	**65**	**65**	**100**
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Jumlah rekomendasi yang dikeluarkan**	**Dokumen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**#DIV/0!**	**5**	**5**	**100**

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Renstra SKPD Tahun 2024 (Akhir Priode Rensra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan Keluaran Kegiatan s/d 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah Tahun 2025 n-1	Perkiraan Relisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d 2025 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang	0	0	0	0	#DIV/0!	50	50	100
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	0	0	0	0	#DIV/0!	4	4	100

Berdasarkan analisis pelaksanaan program dan kegiatan serta kinerja pelayanan pada Renja tahun 2024, ada beberapa hambatan dan permasalahan yang dialami dalam pencapaian kinerja Perangkat Daerah antara lain:

1. Adanya kebijakan pimpinan untuk menunda pelaksanaan beberapa kegiatan untuk belanja-belaja tertentu hal ini tentunya berpengaruh pada pencapaian target kinerja yang telah di tetapkan.

Adapun solusi yang digunakan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut di atas adalah :

1. Untuk memfokuskan anggaran Kecamatan Mekar Baru di bidang pemulihan ekonomi masyarakat dalam hal pemberdayaan masyarakat desa.
2. Untuk dapat tetap tercapai target kinerja Kecamatan Mekar Baru tetap melaksanakan kegiatan semaksimal mungkin dengan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kecamatan Mekar Baru Kabupaten Tangerang berdasarkan Indikator Kinerja yang sudah ditentukan dalam Renstra maupun terhadap IKU (Indikator Kinerja Utama) dan Perjanjian Kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentangPetunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Efektivitas adalah tercapainya sasaran dan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Efektivitas pencapaian sasaran diartikan sebagai tercapaianya sasaran (100% atau lebih) sesuai target yang ditetapkan berdasarkan capaian kinerja sasaran.

Bersamaan dengan reviu Rencana Strategis juga dilakukan reviu Indikator Kinerja Kecamatan Mekar Baru serta menghasilkan penjelasan tentang indikator berupa formulasi atau cara pengukuran agar berorientasi hasil.

Kinerja Pelayanan di Kecamatan Mekar Baru Kabupaten Tangerang dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja seperti pada table berikut:

Tabel 2.2

Uraian Indikator Kinerja Pelayanan di Kecamatan Mekar Baru

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR		
	Uraian Outcome	Formulasi / Cara Pengukuran	Sumber Data
Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Berkualitas **(Sasaran 1)**	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai IKM	Bag. Organisasi

Meningkatkan kinerja Perangkat Daerah **(Sasaran 2)**	Nilai AKIP Kecamatan Mekar Baru	Nilai Akip	Inspektorat

Tahun 2024 adalah tahun Pertama pelaksanaan Rencana Strategis 2024-2026, pencapaian kinerja Kecamatan Mekar Baru Kabupaten Tangerang dapat di gambarkan sebagai berikut :

Tabel 2.3

Capaian IKU Kecamatan Mekar Baru Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	89,40	-	-
2	Nilai AKIP Kecamatan Mekar Baru	Nilai	75,30/ BB	-	-

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja sebagaiberikut :

1. Capaian kinerja yang melebih/melampaui target ditunjukan pada:
2. Capaian kinerja yang sesuai target atau mencapai 100% ditunjukan pada:
3. Capaian kinerja yang tidak mencapai target 100% ditunjukan pada:
   - Indikator Nilai AKIP Kecamatan Mekar Baru dengan capaian kinerja 0 %.

Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat dengan capaian kinerja 0 %.

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 2 sasaran tersebut, dapat disimpulkan bahwa Capaian Kinerja Kecamatan Mekar Baru Tahun 2024 adalahsebesar 0 %

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Pemetaan terhadap permasalahan di Kecamatan Mekar Baru perlu dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan yang dirumuskan dalam Rencanastrategis Kecamatan Mekar Baru Tahun 2024-2026.

Beberapa isu permasalahan di Kecamatan Mekar Baru yang perlu mendapat perhatian adalah:

Tabel 2.4

Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

No.	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1.	Belum	Penyelenggaraan	Belum Tersedianya Database Rencana Pembangunan

No.	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
	Optimalnya Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan Belum Optimal	Penyelenggaraan Pemerintahan DesaTidak Tepat Waktu
			Pemberdayaan ekonomi kerakyatanmasih rendah
			Pembinaan Keagamaan, Sosial dan Kepemudaan serta ketentraman dan ketertiban umum belum maksimal
			Kebijakan tata ruang wilayah kecamatan yang belum tertata dengan memperhatikan Lingkungan
			Masih minimnya kepedulian masyarakat tentang kebersihan danpersampahan
			Infrastruktur penunjang lingkungan masih minim
			Penerapan Sistem Pelayanan BerbasisIT Rendah
		Belum Optimalnya Pelayanan Publik	Infrastruktur Pelayanan Publik MasihKurang
			Kurangnya Koordinasi dan Pembinaan Pelayanan Publik dengan Pemerintah Desa
			SOP dan SPM yang dibuat belumsesuai dengan standar

Dalam peningkatan kinerja Kecamatan Mekar Baru, ada potensi yang bisa dikembangkan yaitu berupa kekuatan dan menjadikan sebagai cambuk untuk perbaikan kinerja. Kekuatan dan kelemahan adalah bagian dari organisasi yang selalu ada dan

perlu mendapat perhatian untuk tidak menjadi sumber permasalahan, tetapi menjadi hal bermanfaat untuk peningkatan kinerja organisasi.

Kekuatan, merupakan segala hal yang dibutuhkan pada kondisi yang sifatnya internal organisasi agar kegiatan organisasi bisa berjalan maksimal. Potensi yang berupa kekuatan yang dimiliki Kecamatan Mekar Baru,diantaranya:

1. SDM (Sumber Daya Manusia) yaitu personal atau pegawai yang cukup;
2. Sarana dan prasarana serta perlengkapan yang cukup dan bisa ditingkatkan;
3. Anggaran yang cukup dan tersedia dan bisa ditingkatkan;
4. Peraturan Daerah dan peraturan lainnya yang sudah mendukung.

Kelemahan, merupakan kekurangan pada kondisi internal organisasi sehingga kegiatan organisasi belum maksimal terlaksana. Adapun kelemahan yang ada di Kecamatan Mekar Baru dan bisa menghambat terhadap kinerja, diantaranya adalah:

1. Motivasi dan kemampuan SDM yang masih rendah;
2. Pemeliharaan sarana dan prasarana yang belum mencapai sasaran;
3. Profesional pegawai yang belum sesuai harapan;
4. Koordinasi yang masih lemah;
5. Waktu yang terbatas dalam pelaksanaan sehingga perlu diperhatikan dengan benar.

Tantangan, merupakan hal/objek yang harus ditanggulangi/diraih/ dilakukan**.** Tantangan yang dihadapi Kecamatan Mekar Baru dalam pengembangan pelayanan diantaranya:

1. Adanya provokator baik dari internal maupun eksternal yang terbiasa dengan hal-hal kurang baik dalam pelayanan;
2. Pegawai dan masyarakat yang kurang peduli terhadap perbaikan dan perubahan pelayanan ke arah yang lebih baik;
3. Desa sebagai penyelenggara otonomi pemerintahan terendah, menuntut kualitas sumber daya manusia aparatur dan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik sehingga lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
4. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel, menuntut terwujudnya dokumen perencanaan, pengendalian dan pelaporan yang berkualitas;
5. Penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik (e-government), menuntut kemampuan aparatur, baik di tingkat kecamatan, kelurahan maupun desa dalam penguasaan dan optimalisasi pemanfaatan teknologi dan infomasi;
6. Masyarakat Kecamatan Mekar Baru menuntut terwujudnya

kondisi keamanan dan ketertiban yang memadai dan peningkatan kualitas sarana prasarana publik serta pelayanan publik.

7. Penguatan ideologi kebangsaan untuk senantiasa menjaga keutuhan NKRI, dan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan;
8. Pemberdayaan lembaga-lembaga keagamaan, sosial dan kepemudaan.

Peluang, merupakan ruang gerak, baik konkrit maupun abstrak, yang memberikan kemungkinan bagi terlaksananya suatu kegiatan dalam usaha mencapai tujuan**.** Adapun peluang dari pengembangan pelayanan di Kecamatan Mekar Baru adalah:

1. Adanya peraturan yang jelas tentang Tugas, Pokok dan Fungsi Kecamatan dan unsur di dalamnya, sehingga tidak ada keraguan dalam pelaksanaannya;
2. Kecamatan Mekar Baru berwenang melaksanakan proses perencanaan, pengendalian, pelaksanaan dan pelaporan program dan kegiatan untuk organisasinya;
3. Kecamatan Mekar Baru berwenang melaksanakan koordinasi dengan instansi vertikal tingkat kecamatan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa untuk 7 (tujuh) desa;
4. Dukungan semua pihak dalam peningkatan pelayanan yang prima;
5. Perencanaan penguatan ideologi kebangsaan dan peningkatan persatuan dan kesatuan;
6. Perencanaan pemberdayaan orgranisasi-organisasi keagamaan, sosial dan kepemudaan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana kerja bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan apabila ditunjang dengan dokumen perencanaan yang baik, dalam rangka mengawal program dan kegiatan pembangunan agar dapa berjalan secara efektif dan efisien serta tepat sasaran. Dokumen perencanaan berawal dari RPJMD Kabupaten Tangerang, Rencana Strategis Kecamatan dan Rencana Kerja Kecamatan.

Rencana kerja Kecamatan tahun 2025 sesuai dengan Renstra Kecamatan Mekar Baru tahun 2024-2026, rencana kerja ini agar mewujudkan konsistensi dokumen perencanaan Kecamatan. Sehingga dapat mewujudkan seluruh program dan kegiatan Kabupaten Tangerang yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Tangerang. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD dan hasil analisa kebutuhan untuk pelaksanaan Program dan Kegiatan tahun 2024, Kecamatan Mekar Baru untuk anggaran 2025 mendapat alokasi anggaran Sebelum Perubahan sebesar Rp. 17.003.806.962,- dari kebutuhan sesuai analisis Anggaran Perubahan Sebesar Rp. 19.291.890.414,-. Pada tahun 2025 sesuai rancangan awal, Kecamatan Mekar Baru Kabupaten Tangerang akan melaksanakan 6 program, 12 kegiatan, dan 30 sub kegiatan.

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024
KECAMATAN MEKAR BARU KAB. TANGERANG
TAHUN 2025

Rencana Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan RKPD			
Uraian	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Uraian	Indikator	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
			Target	Anggaran			Target	Anggaran
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	**Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan**	**Persen**	**100**	**9.304.018.369**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA**	**Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan**	**100**	**9.756.552.939**
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Dokumen**	**15**	**150.255.080**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**16**	**245.832.490**
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	7	58.099.180		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8	153.676.590
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	4	47.492.600		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	47.492.600
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			

Rencana Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan RKPD			
Uraian	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Uraian	Indikator	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
			Target	Anggaran			Target	Anggaran
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	44.663.300		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	44.663.300
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Kegiatan Adm Keuangan Perangkat Daerah**	**Dokumen**	**17**	**5.361.461.933**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Kegiatan Adm Keuangan Perangkat Daerah**	**17**	**4.951.265.793**
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	14	5.291.521.343		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14	4.881.325.203
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	2	50.473.950		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2	50.473.950
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			
	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1	19.466.640		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	19.466.640
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Dokumen**	**2**	**110.962.500**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**2**	**110.962.500**

Rencana Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan RKPD			
Uraian	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Uraian	Indikator	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
			Target	Anggaran			Target	Anggaran
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya					Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	44	19.624.000		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	44	19.624.000
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			
	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	80	91.338.500		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	80	91.338.500
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Dokumen**	**7**	**1.171.212.000**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**7**	**1.863.851.300**
Penyediaan Komponen InstalasirnnListrik/Penerangan Bangunan Kantor					Penyediaan Komponen InstalasirnnListrik/Penerangan Bangunan Kantor			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	297	39.795.900		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	297	39.795.900
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	121	548.299.180		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	140	808.715.180

Rencana Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan RKPD			
Uraian	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Uraian	Indikator	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
			Target	Anggaran			Target	Anggaran
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1217	102.474.100		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1217	102.474.100
Penyediaan Bahan Logistik Kantor					Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	Paket	1924	160.156.000		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	2724	296.031.000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	139001	136.540.820		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	275190	194.005.120
Fasilitasi Kunjungan Tamu					Fasilitasi Kunjungan Tamu			
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4123	124.140.000		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	8228	259.480.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			

Rencana Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan RKPD			
Uraian	**Indikator**	**Satuan**	**Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan**		**Uraian**	**Indikator**	**Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan**	
			Target	**Anggaran**			**Target**	**Anggaran**
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	687	59.806.000		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	921	163.350.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Dokumen Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Dokumen**	**3**	**1.397.306.019**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Dokumen Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**3**	**1.396.820.019**
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	288.446.451		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	288.446.451
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	14	1.108.859.568		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	14	1.108.373.568
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Dokumen Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Dokumen**	**18**	**1.112.820.837**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Dokumen Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**18**	**1.187.820.837**
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	4	144.911.968		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4	144.911.968

Rencana Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan RKPD			
Uraian	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Uraian	Indikator	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
			Target	Anggaran			Target	Anggaran
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	5	141.689.984		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5	141.689.984
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	114	126.600.000		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	200	201.600.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5	699.618.885		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	699.618.885
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar**	**Persen**	**63**	**4.922.691.883**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar**	**63**	**6.726.140.765**
	Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara	**Persen**	**60**			**Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara**	**60**	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	**Jumlah Dokumen Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Dokumen**	**14**	**64.905.240**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Jumlah Dokumen Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**14**	**64.905.240**

Rencana Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan RKPD			
Uraian	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Uraian	Indikator	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
			Target	Anggaran			Target	Anggaran
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	14	64.905.240		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	14	64.905.240
Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	**Jumlah Dokumen Kegaitan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**	**Dokumen**	**63**	**4.857.786.643**	**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**	**Jumlah Dokumen Kegaitan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**	**79**	**6.661.235.525**
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum					Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum			
	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Dokumen	63	4.857.786.643		Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	79	6.661.235.525
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Persentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan**	**Persen**	**58**	**2.068.158.510**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan**	**58**	**2.100.258.510**
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Jumlah laporan pemberdayaan**	**Dokumen**	**33**	**2.068.158.510**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Jumlah laporan pemberdayaan**	**33**	**2.100.258.510**
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa					Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga	11	124.131.810		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	11	124.131.810

Rencana Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan RKPD			
Uraian	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Uraian	Indikator	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
			Target	Anggaran			Target	Anggaran
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan					Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	32	1.944.026.700		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	32	1.976.126.700
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti**	**Persen**	**100**	**228.726.790**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti**	**100**	**228.726.790**
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**Jumlah Dokumen Kegaitan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Dokumen**	**12**	**228.726.790**	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Jumlah Dokumen Kegaitan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**12**	**228.726.790**
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan					Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			
	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	228.726.790		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12	228.726.790
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**Prosentase Program Penyelaengaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**Persen**	**55**	**316.769.280**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Prosentase Program Penyelaengaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**55**	**316.769.280**
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Jumlah Dokumen Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**Dokumen**	**11**	**316.769.280**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Jumlah Dokumen Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**11**	**316.769.280**
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahunrnn1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia					Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahunrnn1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia			

Rencana Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan RKPD			
Uraian	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Uraian	Indikator	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
			Target	Anggaran			Target	Anggaran
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang	600	264.237.940		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	600	264.237.940
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan					Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			
	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	4	52.531.340		Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4	52.531.340
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**Prosentase Pemenuhan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persen**	**67**	**163.442.130**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Prosentase Pemenuhan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**67**	**163.442.130**
Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasinnPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Jumlah Dokumen Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa**	**Dokumen**	**41**	**163.442.130**	**Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasinnPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Jumlah Dokumen Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa**	**41**	**163.442.130**
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa					Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa			
	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Laporan	9	132.150.140		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	9	132.150.140
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa					Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa			

Rencana Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan RKPD			
Uraian	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Uraian	Indikator	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
			Target	Anggaran			Target	Anggaran
	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	32	31.291.990		Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	32	31.291.990
Jumlah			**17.003.806.962**		**Jumlah**		**19.291.890.414**	

2.1 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan Program dan Kegiatan Kecamatan Mekar Baru pada tahun 2025 dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum dan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati dalam rangka penguatan otonomi daerah diarahkan pada:

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang menjadi kewenangan kecamatan dan peningkatan kualitas aparaturnya;
2. Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan desa;
3. Upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, dan koordinasi dengan Muspika yang ada di Kecamatan Mekar Baru.
4. Mendorong kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi;
5. Peningkatan semua infrastruktur yang ada di desa-desa se Kecamatan Mekar Baru. Baik sarana jalan, irigasi dan saluran-saluran air serta sarana pendidikan serta kesehatan.

Telaah usulan Program dan Kegiatan masyarakat ini didasari oleh pemikiran masyarakat melalui musrenbang yang telah dilakukan dan perlunya peningkatan peran serta masyarakat dalam melaksanakan musyawarah pembangunan baik yang dilaksanakan di desa maupun di Kecamatan

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Sejalan dengan arah kebijakan pembangunan jangka menengah 2024-2026 dalam rangka untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan tahun 2024, selain itu disesuaikan dengan adanya kondisi pandemi seperti sekarang ini, maka arah kebijakan pembangunan difokuskan kepada dua prioritas yaitu Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan Produktivitas Ekonomi usaha kerakyatan.

Arah kebijakan dalam rangka Peningkatan akses pembangunan untuk tahun 2025 diprioritaskan pada kedua prioritas tersebut dapat dilakukan melalui:

a. Peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan
b. Peningkatan SDM Aparatur dan Tata Kelola Pemerintahan
c. Peningkatan aktivitas ekonomi
d. Peningkatan ketahanan pangan

3.2 Tujuan dan Sasaran

perumusan tujuan dan sasaran pada periode pembangunan jangka menengah Kabupaten Tangerang pada periode sebelumnya mensacu pada visi dan misi Kepala Daerah terpilih. Berbeda dengan periode 2024-2026, sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang penyusunan Dokumen perencanaan pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru yang menyebabkan adanya perbeda.an pendekatan perumusan tujuan dan sasaran karena tidak tersedianva visi dan misi Kepala Daerah. Sehingga untuk tetap menjaga keselarasan dengan dokurnen perencanaan yang berlaku dan menjaga kesinambungan pembangunan antar periode, maka pernerintah Kabupaten Tangerang merumuskan konsep Rencana Pembangunan Daerah 2024-2026 yang mempertimbangkan hal-hal sebagai :

1. Misi RPJPD Pemenntah Kabupaten Tangerang 2024-2026;
2. 7 Agenda Pembangunan RPJMN 2024-2026;
3. Misi RPJMD pemerintah Kabupaten Tangerang 2024-2026;
4. Isu-isu strategis Kabupaten Tangerang 2024-2026

Berdasarkan pertirnbangan dari keempat muatan tersebut memberikan hasil identifikasi berupa empat aspek vang menjadi kesamaan dan dapat dijadikan sebaei fokus perencanaan periode selanjutnya. Keempat aspek tersebut yaitu :

1. peningkatan Kualitas Pembangunan Sumber Dava Manusia yang merupakan dimensi Perencanaan Yang berkaitan dengan peningkatan kualitas sumber daya
2. manusia di Kabupaten Tangerang
3. Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi sebagai dimensi perencanaan yang berkaitan dengan kemajuan dan daya saing masyarakat dalam bidang ekonomi;

4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang merupakan dmensi pereruanaan yang berupava menyelengarakan tata kelola pemerintahan yang balk;
5. peningkatan Kualitas Infrastruktur sebagai dimensi pererxanaan berfokus pada pembar€unan infrastruktur yang terpadu serta berbasis pada ekonomi dan ekologi.

Keempat asrk tersebut rnenjadi dasar rrurnusan km:sep Rencana Pembangunan Daerah vang diturunkan menjadi serangkaian rumusan tujuan dan

sasaran Pemerintah Kabupaten Tangerang ta hun 2024-2026, sebagai berikut :

1. Meningkatnva Kualitas Sumber Daya Manusia
2. Meningkatkan Kondusifitas Daerah dengan pengembangan perilaku Masyarakat Berlandaskan Keagamaan,Toleransi, dan Gotong Royong
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara komprehensif
4. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan vang Baik melalui Digitalisasi dan I ntegrasi Pelayanan Publik
5. Meningkatkan pengembangan Infrastruktur yang Terpadu dan Berkelanjut

penyusunan Renstra Badan pengelola Keuangan Dan Aset Daerah merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Tangerang. sehingga semua langkah-langkah yang disusun dalam Renstra Badan pengelola Keuangan Dan Aset Daerah sejalan derwan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026.

Berdasarkan penjabaran atas tujuan Rencana Pembangunan Daerah (NPD) Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026, BPKAD berfokus pada tujuan dan sasaran Meningkatkan Kualitas Tata Kebla pernerintahan yang Baik melalui Digitalisasi dan integrasi Pelayanan Publik.

Pada tujuan ini terlihat dengan jelas peran sena dan keterlibatan Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah dalam mendukung tujuan dalam RPD Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026, sesuai dengan kewenangan yang telah menjadi tanggung jawab Badan pengelola Keuangan Dan Aset Daerah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi. Selanjutnya Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah, dalam mewujuüan pencapaian tujuan 4 tersebut berfokus pada tujuan dan sasaran sebagai berikut:

Tujuan : Meningkatkan kualitas pelayanan publik kecamatan yang Baik melalui Dgitalisasi dan Integrasi Pelayanan Publik dengan indikator:

1. **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik**

   Sasaran : Terpenuhinya pelayanan publik sesuai dengan standar kecamatan

   Dengan Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat

2. **Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja**

   Sasaran : Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja

   Dengan Indikator : Nilai AKIP

Dengan sasaran dan indikator sasaran tersebut, maka Badan pengelola Keuangan Dan Aset Daerah sebagai penyelenggara pelayanan bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah menitikberatkan seluruh program dan kegiatan guna mencapai tuuan dan sasaran tersebut.

Tujuan, sasaran dan target kinerja Kecamatan Mekar Baru Tahun 2025 beserta indikator kinerjanya di sajikan dalam tabel:

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR			Satuan	Target
	Uraian Outcome	Formulasi / Cara Pengukuran	Sumber Data		
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik **(Sasaran 1)**	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai IKM	Bagian Organisasi SETDA	Nilai	89,40
Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja **(Sasaran 2)**	Nilai AKIP Kecamatan Mekar Baru	Nilai AKIP	Inspektorat	Nilai	75,30/ BB

3.3 Program dan Kegiatan Perangkat daerah tahun 2025

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan- tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan. Pelaksanaan anggaran yang akan dilaksanakan Kecamatan Mekar Baru dengan anggaran 2025 sebesar Rp. 17.003.806.962 terdiri atas 6 program, 12 kegiatan, dan 30 sub kegiatan. Program, kegiatan, dan sub kegiatan kecamatan Mekar Baru Tahun 2025 dapat dilihat padatabel dibawah ini :

Program	Kegiatan	Sub. Kegiatan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA	**Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKP
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
		Fasilitasi Kunjungan Tamu
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Program	Kegiatan	Sub. Kegiatan
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daera	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Ker Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertib Umum**	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
PROGRAM PEMBINAA DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DES	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
		Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMU	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

Pelaksanaan anggaran yang akan dilaksanakan Kecamatan Mekar Baru dengan Anggaran 2025 Sebelum Perubahan sebesar Rp. 17.003.806.962 dan Anggaran Setelah Perubahan Sebesar Rp. 19.291.890.414 Selisih Penambahan Sebesar Rp. 2.288.083.452 yang terdiri atas 6 program, 12 kegiatan, dan 30 sub kegiatan. Dar 6 Program 3 Program Terjadi Perubahan Anggaran, Adapun Rincian Anggaran Perubahan Belanja untuk Tahun 2025 pada Kecamatan

Mekar Baru dapat dilihat dengan rincian:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota dengananggaran Sebelum Perubahan sebesar Rp. 9.304.018.369 dan Setelah Perubahan Sebesar Rp. 9.756.552.939 Selisih Penambahan Sebesar Rp. 452.534.570 dengan jumlah kegiatan sebanyak 6 kegiatan dan 21 sub kegiatan;
2. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintah Desa dengan anggaran sebesar Rp. 163.442.130 dengan jumlah kegiatan sebanyak 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan;
3. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan anggaran Sebelum Perubahan sebesar Rp. 4.922.691.883 dan Setelah Perubahan Sebesar Rp. 6.726.140.765 Selisih Penambahan Sebesar Rp. 1.803.448.882 dengan jumlah kegiatan sebanyak 2kegiatan dan 2 sub kegiatan;
4. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan anggaran Sebelum Perubahan sebesar Rp. 2.068.158.510 dan Setelah Perubahan Sebesar Rp. 2.100.258.510 Selisih Penambahan Sebesar Rp. 32.100.000 dengan jumlah kegiatan sebanyak 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan;
5. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan anggaran sebesar sebesar Rp. 228.726.790 dengan jumlah kegiatan sebanyak 1 kegiatandan 1 sub kegiatan;
6. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan anggaran sebesar sebesar Rp. 316.769.280 dengan jumlah kegiatan sebanyak 1 kegiatandan 2 sub kegiatan

Tabel 4.1
REKAPITULASI PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB. KEGIATAN KECAMATAN MEKAR BARU TAHUN ANGGARAN 2025

Uraian	Indikator	Satuan	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan		Bertambah/ Berkurang
			Target	Anggaran	Target	Anggaran	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	**Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan**	**Persen**	**100**	**9.304.018.369**	**100**	**9.756.552.939**	**(452.534.570)**
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Dokumen**	**15**	**150.255.080**	**16**	**245.832.490**	**(95.577.410)**
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	7	58.099.180	8	153.676.590	(95.577.410)
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	4	47.492.600	4	47.492.600	-
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	44.663.300	4	44.663.300	-
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Kegiatan Adm Keuangan Perangkat Daerah**	**Dokumen**	**17**	**5.361.461.933**	**17**	**4.951.265.793**	**410.196.140**
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	14	5.291.521.343	14	4.881.325.203	410.196.140
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	2	50.473.950	2	50.473.950	-

Uraian	Indikator	Satuan	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan		Bertambah/ Berkurang
			Target	Anggaran	Target	Anggaran	
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1	19.466.640	1	19.466.640	-
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Dokumen**	**2**	**110.962.500**	**2**	**110.962.500**	**-**
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	44	19.624.000	44	19.624.000	-
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	80	91.338.500	80	91.338.500	-
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Dokumen**	**7**	**1.171.212.000**	**7**	**1.863.851.300**	**(692.639.300)**
Penyediaan Komponen InstalasirnnListrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	297	39.795.900	297	39.795.900	-
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	121	548.299.180	140	808.715.180	(260.416.000)
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1217	102.474.100	1217	102.474.100	-
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	Paket	1924	160.156.000	2724	296.031.000	(135.875.000)
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	139001	136.540.820	275190	194.005.120	(57.464.300)

Uraian	Indikator	Satuan	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan		Bertambah/ Berkurang
			Target	Anggaran	Target	Anggaran	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4123	124.140.000	8228	259.480.000	(135.340.000)
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	687	59.806.000	921	163.350.000	(103.544.000)
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Dokumen Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Dokumen**	**3**	**1.397.306.019**	**3**	**1.396.820.019**	**486.000**
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	288.446.451	12	288.446.451	-
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	14	1.108.859.568	14	1.108.373.568	486.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Dokumen Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Dokumen**	**18**	**1.112.820.837**	**18**	**1.187.820.837**	**(75.000.000)**
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	4	144.911.968	4	144.911.968	-
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	5	141.689.984	5	141.689.984	-
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	114	126.600.000	200	201.600.000	(75.000.000)
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5	699.618.885	5	699.618.885	-

Uraian	Indikator	Satuan	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan		Bertambah/ Berkurang
			Target	Anggaran	Target	Anggaran	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar**	**Persen**	**63**	**4.922.691.883**	**63**	**6.726.140.765**	**(1.803.448.882)**
	Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara	**Persen**	**60**		**60**		
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	**Jumlah Dokumen Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Dokumen**	**14**	**64.905.240**	**14**	**64.905.240**	**-**
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	14	64.905.240	14	64.905.240	-
Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	**Jumlah Dokumen Kegaitan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**	**Dokumen**	**63**	**4.857.786.643**	**79**	**6.661.235.525**	**(1.803.448.882)**
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Dokumen	63	4.857.786.643	79	6.661.235.525	(1.803.448.882)
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Persentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan**	**Persen**	**58**	**2.068.158.510**	**58**	**2.100.258.510**	**(32.100.000)**
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Jumlah laporan pemberdayaan**	**Dokumen**	**33**	**2.068.158.510**	**33**	**2.100.258.510**	**(32.100.000)**
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga	11	124.131.810	11	124.131.810	-
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	32	1.944.026.700	32	1.976.126.700	(32.100.000)

Uraian	Indikator	Satuan	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan		Bertambah/ Berkurang
			Target	Anggaran	Target	Anggaran	
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti**	**Persen**	**100**	**228.726.790**	**100**	**228.726.790**	-
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**Jumlah Dokumen Kegaitan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Dokumen**	**12**	**228.726.790**	**12**	**228.726.790**	-
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	228.726.790	12	228.726.790	-
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**Prosentase Program Penyelaengaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**Persen**	**55**	**316.769.280**	**55**	**316.769.280**	-
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Jumlah Dokumen Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**Dokumen**	**11**	**316.769.280**	**11**	**316.769.280**	-
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahunrnn1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang	600	264.237.940	600	264.237.940	-
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	4	52.531.340	4	52.531.340	-
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**Prosentase Pemenuhan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persen**	**67**	**163.442.130**	**67**	**163.442.130**	-
Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasinnPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Jumlah Dokumen Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa**	**Dokumen**	**41**	**163.442.130**	**41**	**163.442.130**	-

Uraian	Indikator	Satuan	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan		Bertambah/ Berkurang
			Target	Anggaran	Target	Anggaran	
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Laporan	9	132.150.140	9	132.150.140	-
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	32	31.291.990	32	31.291.990	-
Jumlah			**17.003.806.962**		**19.291.890.414**		**(2.288.083.452)**

BAB IV
PENUTUP

4.1. Catatan Penting dalam Penyusunan Renja

Penyusunan Renja Kecamatan Mekar Baru Kabupaten Tangerang Tahun 2025 berupa program dan kegiatan yang akan dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan public di Kabupaten Tangerang berdasarkan sasaran-sasaran yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tangerang 2024-2026 dan Rencana Strategis (RENSTRA), Untuk mencapai sasaran tersebut, harus menerapkan prinsip-prinsip efektif, efesien, transfaransi dan akuntabilitas.

Guna memperoleh optimalisasi pencapaian hasil pada pelaksanaan program dan kegiatan, mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan dalamsatu program maupun antar program, dalam satu instansi maupun antar instansi dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Mekar Baru Kabupaten Tangerang.

Untuk keterpaduan dan sinkronisasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan harus melalui proses musyawarah melalui tahapan Forum Musrenbang Kecamatan Mekar Baru Kabupaten Tangerang agar terintegrasi dengan baik.

4.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD

RPJMD dan RKPD sebagai pengganti Permendagri nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka kaidah-kaidah penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Mekar Baru Kabupaten Tangerang tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Renja Kecamatan Mekar Baru Kabupaten Tangerang tahun 2025 berpedoman pada RPJMD dan Ranwal RKPD Kabupaten Tangerang tahun 2025 dan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 39 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026.
2. Penyusunan Renja Kecamatan Mekar Baru Kabupaten Tangerang tahun 2025 adalah upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Tangerang dengan berpedoman pada dokumen perencanaan.

4.3. Rencana Tindak Lanjut

1. Perlunya peningkatan pelayanan publik yang berkualitas;
2. Perlunya penyusunan perencanaan kebutuhan ASN;
3. Perlunya peningkatan pelayanan berbasis IT;
4. Perlunya Peningkatan infrastruktur kecamatan;
5. Perlunya peningkatan pengelolaan risiko kecamatan;

Perlunya sinergitas perencanaan yang intensif dalam melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah lain dan dokumen perencanaan yang tepat waktusesuai ketentuan

Demikian Renja Tahun 2025 Kecamatan Mekar Baru disusun sebagai acuan atau pedoman bagi seluruh pejabat dan pelaksana Kecamatan Mekar Baru dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan dalam

rangka memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat di Kecamatan Mekar Baru khususnya dan Kabupaten Tangerang pada umumnya.

59. Kecamatan Sukamulya

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 272-273, Rencana Kerja Perubahan yang selanjutnya disingkat dengan Renja memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dalam Permendagri No 86 Tahun 2017 Pasal 1 ayat 29, Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah (Renja PD) merupakan dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 *(satu)* tahun.

Renja Kecamatan Sukamulya Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan bersifat teknis operasional yang menjabarkan Renstra Kecamatan Sukamulya Tahun 2024-2026, serta merupakan Rancangan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Sukamulya Tahun 2025 dengan juga mengacu kepada Tema RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2025 yaitu **"PEMERATAAN PEMBANGUNAN BERWAWASAN LINGKUNGAN DALAM UPAYA PENINGKATAN DAYA SAING DAERAH MELALUI KOLABORASI ANTAR SEKTOR"**. Oleh karena itu, Rencana Kerja Perubahan (Renja) Kecamatan Sukamulya diharapkan dapat mendukung dokumen Renstra Kecamatan Sukamulya periode 2024-2026 serta mendukung Tema RKPD yang sudah ditentukan.

Renja Kecamatan Sukamulya menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja) Perangkat Daerah setiap tahunnya dalam 1 *(satu)* tahun anggaran. Renja Kecamatan Sukamulya juga menjadi acuan dalam mengendalikan dan mengevaluasi pembangunan pada lingkungan Kecamatan Sukamulya. Selain itu, Renja berperan sangat penting dalam menuntun Perangkat Daerah untuk berkonstribusi mewujudkan cita-cita dan tujuan pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengoptimalkan penggunaan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh daerah. Renja Kecamatan Sukamulya berkontribusi dalam mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Tangerang berkaitan dengan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, serta Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.

Dalam menyusun Renja Kecamatan Sukamulya terdapat beberapa proses yang harus ditempuh yaitu dari persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah, penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah, penyusunan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah, hingga penetapan Renja Perangkat Daerah. Selain itu, dokumen Renja memiliki keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan, antara lain RPD, Renja/Resntra K/L dan Renja/Resntra provinsi/kabupaten/kota, dan Renja/Resntra Perangkat Daerah. Keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan RPD, Renja/Resntra K/L dan Renja/Resntra provinsi/kabupaten/kota, dan

dengan Renja/Resntra Perangkat Daerah tersebut berupa tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Kabupaten, Peraturan Kepala Daerah Kabupaten tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, RPD Kabupaten dan memperhatikan Renja Kementerian/Lembaga, Renja Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Tangerang.

Secara khusus, Adapun kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Kecamatan Sukamulya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Verifikasi Rancangan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 Perangkat Daerah Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, serta Berita Acara Kesepakatan Penggunaan Pagu Pendanaan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025 ialah sebagai berikut:

A. Berita Acara Kesepakatan Penggunaan Pagu Pendanaan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025

No.	Nama Kegiatan
1.	Kolaborasi Penanganan Inflasi (Mandatory)
2.	Hasil Musrenbang: a) Pemberdayaan Kelompok Tani; b) Pemberdayaan Keterampilan Kreasi Anyaman dan Bambu; c) Pemberdayaan Pemberian Bibit; d) Pengadaan Fasilitas Pelatihan Komputer dan Las Listrik; e) Peningkatan Kompetisi Kekompok TTG (Teknologi Tepat Guna); f) Fasilitasi Pelatihan dan Peningkatan Kualitas UMKM; g) Pemberdayaan Bidang Pertanian dan Peternakan h) Bedah Rumah i) Peningkatan KapasitasMasyarakat Melalui Pelatihan
3.	Kegiatan Wajib dan Pilihan untuk Kecamatan Sukamulya
4.	Kegiatan untuk Gaji dan Tunjangan

B. Berita Acara Verifikasi Rancangan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 Perangkat Daerah Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

No.	Nama Kegiatan
1.	Betonisasi di 12 Lokasi
2.	Gapura Batas Wilayah
3.	Paving Blok Di 5 Lokasi
4.	Pembangunan U-Ditch
5.	Pemeliharaan Saluran Drainase
6.	Saluran Pembangunan Limbah
7.	Pemagaran Pemakaman Umum TPU
8.	Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan
9.	Pengembangan Gedung Trantibum dan Linmas Kecamatan Sukamulya
10.	Pemeliharaan dan Penataan Kantor Kecamatan Sukamulya

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 632);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
19. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
20. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
22. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara perencanaan, pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daearah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O17 Nomor 13l2);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 14);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
29. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru;
30. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentangRencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 26);
31. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten 2010-2030;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2008 Nomor 01, Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0108);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2009 Nomor 02, Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0209);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 09 Tahun 2009 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2009 Nomor 12);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2016 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2016 Nomor 1611);
37. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah;
38. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 33 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2023 Nomor 33).
39. Permendagri Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan dimaksudkan sebagai arahan dan pedoman bagi Perangkat Daerah untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Untuk itu maksud disusunnya Renja Perubahan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

a. Memberikan acuan resmi bagi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang dalam menyusun Rencana Kerja Perubahan (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang sekaligus menjadi acuan dalam menentukan program dan kegiatan tahunan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Kabupaten;
b. Menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu tiga tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah;
c. Menjabarkan gambaran tentang kondisi Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang;
d. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
e. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah untuk memahami, menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu tiga tahunan;
f. Mengetahui apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan organisasi guna mendukung dan memenuhi tujuan dan sasaran untuk 1 *(satu)* tahun anggaran;
g. Menyesuaikan Perubahan pada RPD Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026.

Adapun tujuan penyusunan dokumen Renja Perubahan, antara lain adalah :

a. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yaitu untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang dan mewujudkan cita-cita yang ingin dicapai dalam 1 *(satu)* tahun anggaran sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab yang diemban Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang;
b. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama 1 *(satu)* tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung tujuan dan sasaran kepala daerah;
c. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah selama 1 *(satu)* tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah;
d. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perubahan (Renja) perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu 1 *(satu)* tahun.

1.4. Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Sukamulya Tahun 2025 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini dijelaskan dasar penyusunan dokumen Renja Kecamatan Sukamulya

1.1 Latar belakang;
1.2 Landasan Hukum;
1.3 Maksud dan tujuan;
1.4 Sistematika penulisan;

Bab II Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan I tahun berkenaan

Pada bab ini dikemukakan hasil evaluasi Renja Kecamatan Sukamulya.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Capaian Renstra Perangkat
2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
2.4. Review Terhadap Rencana Awal RKPD
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Bab III Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah

Pada bab ini dikemukakan rancangan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan serta Pendanaan Kecamatan Sukamulya dalam 1 *(satu)* tahun mendatang.

3.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangakat Daerah
3.2. Tujuan dan Sasaran Kecamatan Sukamulya
3.3. Program Kegiatan dan Sub Kegiatan

Bab VI Penutup

BAB II
EVALUASI RENJA SAMPAI DENGANTRIWULAN I TAHUN BERKENAAN

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Keberhasilan pencapaian Visi dan Misi akan sangat dipengaruhi oleh tingkat kualitas sumberdaya manusia. Karena manusia sebagai subyek pelaku pembangunan yang sangat berperan dan menentukan baik sebagai perencana, pelaksana, pengguna maupun sebagai evaluator dari hasil kegiatan pembangunan. Dengan demikian tingginya tingkat kualitas sumber daya manusia para pelaku pembangunan (masyarakat, pemerintah maupun dunia usaha) sangat diperlukan dalam upaya mencapai tujuan pembangunan. Sesuai dengan tuntutan persaingan dan perkembangan dunia di era globalisasi dimana informasi terus berkembang peningkatan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Tangerang khususnya perlu diarahkan pada upaya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang diharapkan akan mampu tumbuh, berdaya tahan dan mampu bersaing serta tumbuhnya jiwa kewirausahaan. Disisi lain evaluasi hasil perencanaan tahun yang lalu akan menambah basis data untuk merencanakan program dan kegiatan selanjutnya.

Tujuan Evaluasi

1. Menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan: melalui evaluasi maka dapat diketahui derajat pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan.
2. Mengukur tingkat efisiensi suatu kebijakan: melalui evaluasi dapat diketahui berapa biaya dan manfaat dari suatu kebijakan.
3. Mengukur tingkat keluaran: mengukur berapa besar dan kualitas Pengeluaran atau output dari suatu kebijakan.
4. Mengukur dampak suatu kebijakan: evaluasi ditujukan untuk melihat dampak dari suatu kebijakan, baik dampak positif maupun negatif.
5. Untuk mengetahui apabila ada penyimpangan: untuk mengetahui adanya penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi, dengan cara membandingkan antara tujuan dan sasaran dengan pencapaian target.
6. Sebagai masukan (input) suatu kebijakan yang akan datang: untuk memberikan masukan bagi proses kebijakan ke depan agar dihasilkan kebijakan yang lebih baik.

Indikator Evaluasi

1. Efektivitas: apakah hasil yang diinginkan telah tercapai.
2. Kecukupan: seberapa jauh hasil yang telah tercapai dapat memecahkan masalah?
3. Pemerataan: apakah biaya dan manfaat didistribusikan merata kepada kelompok masyarakat berbeda?
4. Responsivitas: apakah hasil kebijakan memuat preferensi/nilai kelompok dan dapat memuaskan mereka?
5. Ketepatan: apakah hasil yang dicapai bermanfaat?

6. Kaitan antara Monitoring dan Evaluasi adalah evaluasi memerlukan hasil dari monitoring dan digunakan untuk kontribusi program.

Evaluasi Pelaksanaan Renja Perubahan Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra
Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 Triwulan I

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2025	Target dan Realisasi Kinerja Program dan \ Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7+9	11=(10/4)
7.01	**KECAMATAN**									
07.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	100	100	100	100	100	100	100	100
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	5	5	5	100	5	5	100
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	5	5	5	100	5	5	100
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	1	1	1	100	1	1	100
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6	6	6	6	100	6	6	100
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dokumen adminstrasi keuangan	25	25	25	25	100	25	25	100
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Ketersediaan Dokumen perencanaan dan Pelaporan	25	25	25	25	100	25	25	100
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKP	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	1	1	100	1	1	100
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Pembinaan Pegawai	2	2	2	2	100	2	2	100
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	25	25	25	25	100	25	25	100
7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	25	25	25	25	100	25	25	100

7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	8	8	8	8	100	8	8	100
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5	5	5	5	100	5	5	100
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	1	1	1	100	1	1	100
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20	20	20	20	100	20	20	100
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	23	23	23	23	100	23	23	100
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	11	11	11	11	100	11	11	100
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undanga	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	12	12	12	100	12	12	100
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	3425	3425	3425	3425	100	3425	3425	100
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2	2	2	2	100	2	2	100
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen Jasa Penunjang	3	3	3	3	100	3	3	100
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	1	1	1	100	1	1	100
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	7	7	7	7	100	7	7	100
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	11	11	11	11	100	11	11	100
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4	4	4	4	100	4	4	100
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2	2	2	2	100	2	2	100
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7	7	7	7	100	7	7	100
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15	15	15	15	100	15	15	100
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	5	5	5	100	5	5	100

7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar	100	100	100	100	100	100	100	100
		Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara	100	100	100	100	100	100	100	100
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah laporan pelayanan	1	1	1	1	100	1	1	100
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2	2	2	2	100	2	2	100
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	jumlah dokumen pemeliharaan	5	5	5	5	100	5	5	100
7.01.02.2.03.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	1	1	1	1	100	1	1	100
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1	1	1	1	100	1	1	100
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	100	100	100	100	100	100	100	100
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Pemberdayaan	2	2	2	2	100	2	2	100
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	2	2	2	2	100	2	2	100
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	8	8	8	8	100	8	8	100
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	100	100	100	100	100	100	100	100
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	jumlah laporan gangguan trantibum	1	1	1	1	100	1	1	100
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	6	6	6	6	100	6	6	100
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase tertib administrasi pemerintahan desa	100	100	100	100	100	100	100	100
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	8	8	8	8	100	8	8	100

7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	8	8	8	8	100	8	8	100
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	8	8	8	8	100	8	8	100
7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	8	8	8	8	100	8	8	100
7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	8	8	8	8	100	8	8	100
7.01.06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	8	8	8	8	100	8	8	100
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	100	100	100	100	100	100	100	100
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	jumlah rekomendasi yang dikeluarkan	8	8	8	8	100	8	8	100
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	50	50	50	50	100	50	50	100
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	8	8	8	8	100	8	8	100

Beradasakan Tabel diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

Kesimpulan:

1) Melaksanakan Evaluasi Capaian Program dan Kegiatan sesuai dengan target Renstra 2025-2026;
2) Memonitoring hasil capaian program dan kegiatan pada Triwulan ke I tahun pertama sesuai realisasi fisik pelaksanaan di lapangan;
3) Melaksanakan monitoring realisasi anggaran pada triwulan I atas program dan kegiatan terutama program strategis yang dilimpahkan kepada pemerintah Kecamatan;
4) Menyusun Berita Acara Monitoring dan Evaluasi berkala Capaian Renstra 2024-2026 kecamatan Sukamulya kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2025 pada Triwulan I.

Kendala yang ditemukan :

1. Adanya perubahan harga satuan dilapangan sehingga perubahan pada Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah ditetapkan.

Langkah-langkah yang harus diambil :

1. Koordinasi dengan pihak ketiga untuk percepatan penyelesaian pelaksanaan kegiatan kontruksi

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Sukamulya

Sebagaimana yang tercantum dalam dokumen Renstra Kecamatan Sukamulya Tahun 2024-2026, Kecamatan Sukamulya membantu Bupati untuk mengemban kewenangan dibidang pemerintahan umum, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan, membina dan mengawasai penyelenggaraan kegiatan Desa dan Kelurahan, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan, dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana tugas dan kewenangan tersebut, Kecamatan Sukamulya memiliki fungsi untuk menyelenggarakan penyiapan rumusan kebijakan teknis, penyiapan rencana dan program kegiatan, penyiapan koordinasi kegiatan, penyiapan bimbingan pelaksanaan kegiatan, pengelolaan administrasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan. Permasalahan yang menjadi urusan Kecamatan Sukamulya dalam melaksanakan fungsi-fungsi yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintah untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi yang menjadi kewenangannya dalam melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan

No.	Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum Tercapai (<) sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan
1	Nilai AKIP Kecamatan Sukamulya	=	a) Masih terdapat kendala dalam penyajian data-data; b) Masih banyaknya keterlambatan pemberian data.	a) Memberikan pemahaman kepada para penanggung jawab kegiatan tentang tata cara pelaporan hasil kegiatan; b) Melakukan evaluasi Kinerja secara berkala.
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat	>	a) Belum maksimalnya Pelaksanaan program Administrasi Pemerintahan dan Pelayanan Umum; b) Masih lemahnya Pengelolaan Administrasi Desa; c) Pelaksanaan SOP yang belum optimal.	a) Memaksimalkan kegiatan pada program Administrasi Pemerintahan dan Pelayanan Umum; b) Meningkatkan Pemahaman Pengelola Administrasi Desa; c) Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) dan mengoptimalkan SOP

Selain dari uraian pada halaman sebelumnya, analisis kinerja pelayanan perangkat daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja palayanan perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan.

Kinerja pelayanan Kecamatan Sukamulya dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja sebagai berikut:

1) Terdapat perubahan personil pada struktur susunan organisasi yang berdampak pada penyegaran tubuh organisasi sehingga dapat melaksanakan program dan pelaksanaan kegiatan dengan baik;
2) Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum;
3) Meningkatnya upaya pemberdayaan masyarakat;
4) Meningkatnya inovasi kecamatan tentang pelayanan dengan adanya inovasi *self service*.

Adapun beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Sukamulya ditengah upaya menjalankan tugas dan fungsinya. Permasalahan ini telah teridentifikasi sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Sukamulya yang juga terdapat dalam dokumen Renstra Kecamatan Sukamulya Tahun 2024-2026 yang dapat terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.3
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Kecamatan Sukamulya

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Isu Strategis
1	2	3	4	5
1	Belum Optimalnya Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan Belum Optimal	Belum Tersedianya Database Rencana Pembangunan	Rendahnya kemampuan dan ketrampilan SDM dalam pengelolaan kegiatan ekonomi
			Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tidak Tepat Waktu	Kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa yang masih kurang
			Pemberdayaan ekonomi kerakyatan masih rendah	Ancaman penyakit menular DBD, Malaria, dan Chikungunya
			Pembinaan Keagamaan, Sosial dan Kepemudaan serta ketentraman dan ketertiban umum belum maksimal	Perlunya perkerasan dan pengaspalan jalan yang menghubungkan beberapa desa/kelurahan
			Kebijakan tata ruang wilayah kecamatan yang belum tertata dengan memperhatikan lingkungan	Sering terjadinya kecelakaan lalu lintas karena jalan sempit dan padat kendaraan
			Masih minimnya kepedulian masyarakat tentang kebersihan dan persampahan	Masih adanya tanah masyarakat yang belum bersertifikat
			Infrastruktur penunjang lingkungan masih minim	Masih adanya rumah tidak layak huni
		Belum Optimalnya Pelayanan Publik	Penerapan Sistem Pelayanan Berbasis IT Rendah	Permasalahan kekurangan permodalan dan tunggakan pinjaman masyarakat dalam lembaga keuangan
			Infrastruktur Pelayanan Publik Masih Kurang	Permasalahan Kesehatan Masyarakat
			Kurangnya Koordinasi dan Pembinaan Pelayanan Publik dengan Pemerintah Desa	Kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa yang masih kurang
			SOP dan SPM yang dibuat belum sesuai dengan standar	Tingginya permintaan masyarakat dalam pelayanan Jaminan Kesehatan

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Kecamatan Sukamulya memiliki keterkaitan dengan Dokumen Renstra (Rencana Strategis) Tujuan ke 1 (Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Digitalisasi dan Integrasi Pelayanan Publik) sasaran ke 2 (Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik). Kecamatan Sukamulya berperan untuk Mewujudkan Tata Pemerintahan yang baik, Demokratis dan Partisipatif. Oleh karena itu, Kecamatan Sukamulya perlu mengidentifikasi faktor penghambat dan faktor pendorong pelayanan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran tersebut sebagaimana tertera pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.4
Faktor Pendorong dan Penghambat Pencapaian Tujuan dan Sasaran Kecamatan Sukamulya

No	Sasaran	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Terpenuhinya pelayanan publik sesuai dengan standar kecamatan	a) Masih terdapat kendala dalam penyajian data-data; b) Masih banyaknya keterlambatan pemberian data.	a) Memberikan pemahaman kepada para penanggung jawab kegiatan tentang tata cara pelaporan hasil kegiatan; b) Melakukan evaluasi Kinerja secara berkala.
2.	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja	a) Masih terdapat kendala dalam penyajian data-data; b) Masih banyaknya keterlambatan pemberian data.	a) Memberikan pemahaman kepada para penanggung jawab kegiatan tentang tata cara pelaporan hasil kegiatan; b) Melakukan evaluasi Kinerja secara berkala.

Adapun dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Sukamulya sangat dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang lebih ditail, sehingga semua langkah-langkah yang disusun dalam Renja Kecamatan Sukamulya sejalan dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tangerang 2025 – 2026.

Sesuai dengan visi "***MEWUJUDKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN TANGERANG YANG MANDIRI, BERDAYA SAING TINGGI DAN BERAKHLAK MULIA***", maka Kecamatan Sukamulya mengusulkan program prioritas kepada perangkat daerah tahun 2024-2026 sebagai berikut:

NO	ISU STRATEGIS	PERMASALAHAN	USULAN KEGIATAN
1	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang Terpadu	Masih Minimnya sarana prasarana	✓ PELEBARAN JALAN DAN BETONISASI DI 6 LOKASI
			✓ PENGADAAN LAHAN KANTOR DESA PARAHU
			✓ PENGADAAN LAHAN KANTOR DESA PARAHU
			✓ PERLUASAN KANTOR KECAMATAN SUKAMULYA
			✓ LANJUTAN PENATAAN ALUN-ALUN KANTOR KECAMATAN SUKAMULYA
			✓ GAPURA BATAS WILAYAH
2	Peningkatan Sumberdaya Manusia yang berdaya saing	Masih Minimnya Keterampilan Masyarakat	✓ PEMBINAAN KURSUS MENJAHIT
			✓ PELATIHAN DI BIDANG MENJAHIT GARMEN/SEPATU
			✓ PELATIHAN DESAIN BATIK TRADISIONAL KECAMATAN SUKAMULYA
			✓ SOSIALISASI STUNTING
		Masih minimnya sarana prasarana kesehatan	✓ PEMBANGUNAN MCK MTSN 4 TANGERANG
			✓ TEMPAT PEMBUANGAN SAMPAH (TPS)
			✓ PEMBANGUNAN DRAINASE
			✓ PEMBANGUNAN GEDUNG PUSKESMAS SUKAMULYA
3	Peningkatan Perekonomian Masyarakat	Masih Minimnya perekonomian desa	✓ PERLUASAN LAHAN PASAR DESA BENDA
			✓ PEMBERDAYAAN IKAN LELE
			✓ PEMBERDAYAAN PENGGEMUKAN SAPI
			✓ BANTUAN PERALATAN PERBENGKELAN MOTOR
			✓ PEMBINAAN USAHA CATERING
			✓ PEMBERDAYAAN BUDI DAYA KELOMPOK TERNAK (BEBEK
			✓ PETELUR)
			✓ BANTUAN BIBIT PERTANIAN KELOMPOK TANI

2.2 Review Terhadap Rencana Awal RKPD

Review terhadap rancangan Awal RKPD Tahun 2025 berkaitan dengan program dan kegiatan yang akan

dilaksanakan pada tahun anggaran 2025. Rumusan kebutuhan program dan kegiatan dilengkapi
dengan lokasi, indikator kinerja, besaran target/tolok ukur, dan besaran dana yang dibutuhkan.

Pada tahun anggaran 2025 review rancangan awal RKPD terhadap hasil analisis kebutuhan dapat disampaikan sebagai Lampiran.

2.3 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Sukamulya Tahun 2025 merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam arah kebijakan RPJPD Kabupaten Tangerang tahun 2024-2026 yang dijabarkan dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sukamulya Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2026. Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Sukamulya Tahun 2025 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang "Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah", Perbup RKPD Tahun 2025 Nomor 21 Tahun 2022, Tanggal 1 Juli 2022, Perbup Perubahan RKPD Tahun 2022 No. 30 Tahun 2022 Tanggal 20 Juli 2022, agar di dalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen perencanaan. Sejalan dengan kebijakan pemerintah Propinsi Banten, tolok ukur kinerja pembangunan dilakukan melalui pengukuran indikator makro (makro ekonomi dan makro sosial), yang menempatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai indikator keberhasilan pembangunan dan evaluasi kebijakan pembangunan.

Dalam konteks perencanaan pembangunan, Kecamatan Sukamulya Kabupaten Tangerang dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan, melayani/memenuhi kebutuhan masyarakat.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKATDAERAH

3.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Rencana kerja Perubahan OPD Kecamatan Sukamulya tersusun dalam program yang merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program tersebut, ditetapkan beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannyaTujuan.

Sebagai Terwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkahoperasionalnya harus dituangkan kedalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yangdiarahkan untuk memenuhi sasaran tujuan, visi dan misi organisasi. Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuntitatif maupun kualitatif. Untuk mengakomodir kebijakan yang disebabkan oleh adanya perubahan tugas pokok dan fungsi OPD Kecamatan Sukamulya Kabupaten Tangerang, diperlukan penyempurnaan maupun penyesuaian program dan kegiatan di dalam renstra OPD guna memenuhi kebutuhan tersebut.

Rencana Kerja merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu pemerintahan di Kabupaten Tangerang.

Adapun rumusan Indeks Kinerja Utama Tahun 2024-2026 adalah
Tabel. 3.1

No	Tujuan'	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	**Meningkatkan kualitas pelayanan publik kecamatan**	Terpenuhinya pelayanan publik sesuai dengan standar kecamatan	Meningkatkan Pelayanan (PATEN) Kecamatan	Meningkatkan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan
			Meningkatkan Pembinaan/Pemberdayaan kepada Kelompok Masyarakat dan Pemuda	Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
			Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Wilayah	Meningkatkan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
		Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja	Meningkatkan Kapasitas Aparatur Pegawai	Meningkatkan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
			Meningkatkan Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Kinerja	Meningkatkan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
			Meningkatkan Kualitas Pelaporan Keuangan Kecamatan	Meningkatkan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
			Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatkan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Berdasarkan Tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Misi 4: Mewujudkan Tata Pemerintahan yang baik, demokratis dan partisipatif;

Tujuan :

a) Meningkatkan kualitas pelayanan publik kecamatan;

Sasaran :

a) Terpenuhinya pelayanan publik sesuai dengan standar kecamatan
b) Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja

Strategi :

a) Meningkatkan Pelayanan (PATEN) Kecamatan
b) Meningkatkan pembinaan/pemberdayaan kepada kelompok masyarakat dan Pemuda
c) Meningkatkan kualitas Infrastruktur Wilayah.
d) Meningkatkan Kapasitas Aparatur Pegawai
e) Meningkatkan Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Kinerja
f) Meningkatkan Kualitas Pelaporan Keuangan Kecamatan
g) Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Arah Kebijakan :

a) Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat Masyarakat Di Kecamatan;
b) Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;

c) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan
d) Meningkatkan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
e) Meningkatkan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
f) Meningkatkan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
g) Meningkatkan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

3.2. Tujuan dan Sasaran Kecamatan Sukamulya

Berdasarkan uraian, data dan penjelesan pada bab-bab sebelumnya, dengan mencermati permasalahan dan potensi yang ada dan dimiliki oleh Kecamatan Sukamulya serta perspektif yang ingin dicapai, maka ditetapkan tujuan strategis untuk tahun 2025. Guna mencapai tujuan tersebut, ditetapkan pula sasaran strategis sebagaimana tercantum dalam dokumen Renstra (Rencana Strategis) Kecamatan Sukamulya Tahun 2024-2026.

Selain dari uraian isu strategis pada bab sebelumnya, terdapat pula fokus peningkatan pelayanan publik Kecamatan Sukamulya Tahun 2025 sebagai berikut:

Fokus 1	Meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja perangkat daerah;
Fokus 2	Memenuhi pelayanan publik sesuai dengan standar kecamatan.

Dari kedua fokus layanan tersebut, akan diuraikan secara lebih rinci lagi pada penyampaian data dan/atau informasi pada tabel berikut.

Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Kecamatan Sukamulya Tahun 2025

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Definisi Operasional	Target Nilai
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Sukamulya	Terpenuhinya pelayanan publik sesuai dengan standar kecamatan	Nilai SKM (Nilai Survey Kepuasan Masyarakat)	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 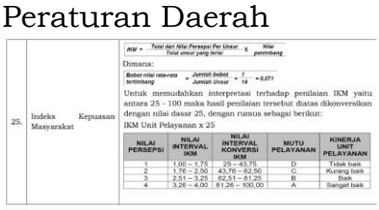	90,50
	Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang AKIP	78,49

			mencakup: 1.Perencanaan Kinerja, 2.Pengukuran Kinerja, 3.Pelaporan Kinerja, 4.Evaluasi Kinerja, 5.Capaian Kinerja.	

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Faktor-faktor yang menjadi bahan Pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan yaitu :

a. Pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Tangerang;
b. Pengentasan kemiskinan Ekstrim;
c. Pengentasan Stunting;
d. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah

Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:

- Kecamatan Sukamulya Pada Tahun 2025 memiliki 6 Program, 13 Kegiatan dan 35 Sub Kegiatan;
- Jumlah Pagu Perubahan Kecmatan Sukamulya pada Tahun 2025 Sebesar Rp. 15.057.108.184,- yang berasal dari unsur kewilayahan.

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KAB. TANGERANG
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		KECAMATAN SUKAMULYA							**12.255.546.191,00**	**14.930.671.430,00**	**15.057.108.184,00**	**2.801.561.993,00**							**12.255.546.191,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**12.255.546.191,00**	**14.930.671.430,00**	**15.057.108.184,00**	**2.801.561.993,00**							**12.255.546.191,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**12.255.546.191,00**	**14.930.671.430,00**	**15.057.108.184,00**	**2.801.561.993,00**							**12.255.546.191,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan**				**100 Persen**	**100 Persen**	**7.446.895.217,00**	**8.321.829.656,00**	**8.704.828.506,00**	**-5.403.028,00**							**7.441.492.189,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				5 Dokumen	5 Dokumen	178.230.279,00	193.041.979,00	149.000.734,00	-27.229.545,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Pelayanan Masyarakat		178.230.279,00	KECAMATAN SUKAMULYA
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	73.075.980,00	70.005.480,00	52.304.110,00	-20.771.870,00	Kab. Tangerang, Sukamulya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			73.075.980,00	KECAMATAN SUKAMULYA
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	65.484.799,00	76.582.999,00	60.656.749,00	-4.828.050,00	Kab. Tangerang, Sukamulya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			65.484.799,00	KECAMATAN SUKAMULYA
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6 Laporan	6 Laporan	37.669.500,00	46.473.500,00	36.039.875,00	-1.629.625,00	Kab. Tangerang, Sukamulya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			37.669.500,00	KECAMATAN SUKAMULYA
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen administrasi keuangan* *Jumlah dokumen dokumen administrasi keuangan*				25 Orang 2 Dokumen	25 Orang 2 Dokumen	4.382.660.014,00	4.602.208.685,00	4.840.164.033,00	457.504.019,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Pelayanan Masyarakat		4.382.660.014,00	KECAMATAN SUKAMULYA
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				25 Orang/bulan	25 Orang/bulan	4.345.546.191,00	4.559.244.862,00	4.808.441.166,00	462.894.975,00	Kab. Tangerang, Sukamulya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			4.345.546.191,00	KECAMATAN SUKAMULYA
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran GKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran GKPD				1 Laporan	1 Laporan	37.113.823,00	42.963.823,00	31.722.867,00	-5.390.956,00	Kab. Tangerang, Sukamulya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			37.113.823,00	KECAMATAN SUKAMULYA
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen Pembinaan Pegawai*				2 Dokumen	2 Dokumen	106.912.000,00	103.580.700,00	92.094.525,00	-14.817.475,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Pelayanan Masyarakat		106.971.500,00	KECAMATAN SUKAMULYA
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				25 Paket	25 Paket	52.736.000,00	48.898.000,00	48.898.000,00	-3.838.000,00	Kab. Tangerang, Sukamulya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			52.795.500,00	KECAMATAN SUKAMULYA
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				25 Orang	25 Orang	54.176.000,00	54.882.700,00	43.196.525,00	-10.979.475,00	Kab. Tangerang, Sukamulya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			54.176.000,00	KECAMATAN SUKAMULYA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah*				8 Dokumen	8 Dokumen	787.635.124,00	1.269.080.164,00	1.391.651.088,00	604.015.982,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Pelayanan Masyarakat		785.273.924,00	KECAMATAN SUKAMULYA
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	31.811.600,00	31.806.300,00	31.806.300,00	-5.300,00	Kab. Tangerang, Sukamulya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			31.811.600,00	KECAMATAN SUKAMULYA
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	343.400.000,00	785.552.240,00	985.552.240,00	642.152.240,00	Kab. Tangerang, Sukamulya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			343.728.800,00	KECAMATAN SUKAMULYA
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				20 Paket	20 Paket	66.734.600,00	40.166.000,00	40.166.000,00	-26.568.600,00	Kab. Tangerang, Sukamulya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			66.734.600,00	KECAMATAN SUKAMULYA
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				32 Paket	32 Paket	98.207.600,00	98.204.400,00	98.204.400,00	-3.200,00	Kab. Tangerang, Sukamulya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			98.207.600,00	KECAMATAN SUKAMULYA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				11 Paket	11 Paket	64.841.324,00	64.895.224,00	49.474.146,00	-15.367.178,00	Kab. Tangerang, Sukamulya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			64.841.324,00	KECAMATAN SUKAMULYA
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	8.640.000,00	68.640.000,00	68.640.000,00	60.000.000,00	Kab. Tangerang, Sukamulya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			8.640.000,00	KECAMATAN SUKAMULYA
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				3425 Laporan	3425 Laporan	100.800.000,00	99.600.000,00	77.700.000,00	-23.100.000,00	Kab. Tangerang, Sukamulya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			98.000.000,00	KECAMATAN SUKAMULYA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	73.200.000,00	80.216.000,00	40.108.000,00	-33.092.000,00	Kab. Tangerang, Sukamulya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			73.310.000,00	KECAMATAN SUKAMULYA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah dokumen Jasa Penunjang*				3 Dokumen	3 Dokumen	944.346.000,00	978.234.168,00	1.056.234.168,00	111.888.168,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Pelayanan Masyarakat		944.521.000,00	KECAMATAN SUKAMULYA
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	14.994.600,00	14.994.600,00	-5.400,00	Kab. Tangerang, Sukamulya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, naikoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			15.175.000,00	KECAMATAN SUKAMULYA
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				7 Laporan	7 Laporan	144.000.000,00	174.000.000,00	174.000.000,00	30.000.000,00	Kab. Tangerang, Sukamulya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, naikoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			144.000.000,00	KECAMATAN SUKAMULYA
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				11 Laporan	11 Laporan	785.346.000,00	789.239.568,00	867.239.568,00	81.893.568,00	Kab. Tangerang, Sukamulya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, naikoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			785.346.000,00	KECAMATAN SUKAMULYA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				4 Dokumen	4 Dokumen	1.049.111.800,00	1.175.683.960,00	1.175.683.960,00	126.572.160,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, naikoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Pelayanan Masyarakat		1.045.835.472,00	KECAMATAN SUKAMULYA
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	2 Unit	77.283.600,00	70.441.984,00	70.441.984,00	-6.821.616,00	Kab. Tangerang, Sukamulya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, naikoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			77.170.492,00	KECAMATAN SUKAMULYA
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7 Unit	7 Unit	139.948.200,00	173.341.976,00	173.341.976,00	33.393.776,00	Kab. Tangerang, Sukamulya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, naikoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			136.794.980,00	KECAMATAN SUKAMULYA
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	15 Unit	31.900.000,00	31.900.000,00	31.900.000,00	0,00	Kab. Tangerang, Sukamulya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, naikoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			31.870.000,00	KECAMATAN SUKAMULYA
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				8 Unit	8 Unit	800.000.000,00	900.000.000,00	900.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Tangerang, Sukamulya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, naikoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			800.000.000,00	KECAMATAN SUKAMULYA
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar**				**100 Persen**	**100 Persen**	**2.844.946.200,00**	**4.358.608.000,00**	**4.393.058.000,00**	**2.311.104,00**							**2.847.257.304,00**	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Jumlah laporan pelayanan*				1 Dokumen	1 Dokumen	165.078.000,00	118.272.000,00	103.422.000,00	-61.654.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, naikoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Pelayanan Masyarakat		157.820.000,00	KECAMATAN SUKAMULYA
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	2 Laporan	165.078.000,00	118.272.000,00	103.422.000,00	-61.654.000,00	Kab. Tangerang, Sukamulya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, naikoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			157.820.000,00	KECAMATAN SUKAMULYA
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	*jumlah dokumen pemeliharaan Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik Kecamatan Sukamulya*				100 Persen 5 Dokumen	100 Persen 5 Dokumen	2.632.032.000,00	4.220.936.000,00	4.280.136.000,00	1.648.104.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, naikoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Pelayanan Masyarakat		2.843.097.504,00	KECAMATAN SUKAMULYA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				5 Dokumen	5 Dokumen	2.632.032.000,00	4.220.936.000,00	4.280.136.000,00	1.648.104.000,00	Kab. Tangerang, Sukamulya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			2.643.097.504,00	KECAMATAN SUKAMULYA
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan*				1 Laporan	1 Laporan	47.838.200,00	19.400.000,00	9.500.000,00	-38.338.200,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Pelayanan Masyarakat		46.339.800,00	KECAMATAN SUKAMULYA
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				1 Laporan	1 Laporan	47.838.200,00	19.400.000,00	9.500.000,00	-38.338.200,00	Kab. Tangerang, Sukamulya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			46.339.800,00	KECAMATAN SUKAMULYA
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan**				**100 Persen**	**100 Persen**	**1.257.091.374,00**	**1.603.869.474,00**	**1.464.729.928,00**	**3.091.924,00**							**1.260.183.298,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Jumlah Laporan Pemberdayaan*				2 Dokumen	2 Dokumen	1.257.091.374,00	1.603.869.474,00	1.464.729.928,00	207.638.554,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Meningkatkan Perekonomian Masyarakat	Meningkatnya Pelayanan Masyarakat		1.260.183.298,00	KECAMATAN SUKAMULYA
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	66.344.075,00	88.244.075,00	88.244.075,00	21.900.000,00	Kab. Tangerang, Sukamulya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Meningkatkan Perekonomian Masyarakat			66.344.075,00	KECAMATAN SUKAMULYA
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				8 Laporan	8 Laporan	1.190.747.299,00	1.515.625.399,00	1.376.485.853,00	185.738.554,00	Kab. Tangerang, Sukamulya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Meningkatkan Perekonomian Masyarakat			1.193.839.223,00	KECAMATAN SUKAMULYA
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti**				**100 Persen**	**100 Persen**	**161.184.000,00**	**122.789.800,00**	**122.789.800,00**	**0,00**							**161.184.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	*jumlah laporan gangguan trantibum*				1 Dokumen	1 Dokumen	161.184.000,00	122.789.800,00	122.789.800,00	-38.394.200,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Pelayanan Masyarakat		161.184.000,00	KECAMATAN SUKAMULYA
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik indonesia, Tentara Nasional indonesia dan instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				6 Laporan	6 Laporan	161.184.000,00	122.789.800,00	122.789.800,00	-38.394.200,00	Kab. Tangerang, Sukamulya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			161.184.000,00	KECAMATAN SUKAMULYA
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti**				**100 Persen**	**100 Persen**	**150.000.000,00**	**158.372.200,00**	**108.523.650,00**	**0,00**							**150.000.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*jumlah rekomendasi yang dikeluarkan*				8 Dokumen	8 Dokumen	150.000.000,00	158.372.200,00	108.523.650,00	-41.476.350,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Pelayanan Masyarakat		150.000.000,00	KECAMATAN SUKAMULYA
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik indonesia																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik indonesia				50 Orang	50 Orang	50.000.000,00	61.744.200,00	45.171.650,00	-4.828.350,00	Kab. Tangerang, Sukamulya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			50.000.000,00	KECAMATAN SUKAMULYA
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				8 Dokumen	8 Dokumen	100.000.000,00	96.628.000,00	63.352.000,00	-36.648.000,00	Kab. Tangerang, Sukamulya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			100.000.000,00	KECAMATAN SUKAMULYA
6.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase tertib administrasi pemerintahan desa**				**100 Persen**	**100 Persen**	**395.429.400,00**	**364.602.300,00**	**263.178.300,00**	**0,00**							**395.429.400,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa*				8 Dokumen	8 Dokumen	395.429.400,00	364.602.300,00	263.178.300,00	-132.251.100,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Pelayanan Masyarakat		395.429.400,00	KECAMATAN SUKAMULYA
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Ditasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				8 Dokumen	8 Dokumen	100.000.000,00	177.850.300,00	125.356.300,00	25.356.300,00	Kab. Tangerang, Sukamulya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			100.000.000,00	KECAMATAN SUKAMULYA
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Ditasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				8 Dokumen	8 Dokumen	95.429.400,00	45.752.000,00	33.668.000,00	-61.761.400,00	Kab. Tangerang, Sukamulya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			95.429.400,00	KECAMATAN SUKAMULYA
	7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa				8 Dokumen	8 Dokumen	50.000.000,00	46.240.000,00	34.180.000,00	-15.820.000,00	Kab. Tangerang, Sukamulya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			50.000.000,00	KECAMATAN SUKAMULYA
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa																		
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				8 Dokumen	8 Dokumen	50.000.000,00	47.380.000,00	34.987.000,00	-15.013.000,00	Kab. Tangerang, Sukamulya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			50.000.000,00	KECAMATAN SUKAMULYA
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				8 Laporan	8 Laporan	100.000.000,00	47.380.000,00	34.987.000,00	-65.013.000,00	Kab. Tangerang, Sukamulya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			100.000.000,00	KECAMATAN SUKAMULYA
	JUMLAH								**12.255.546.191,00**	**14.930.071.430,00**	**15.057.108.184,00**	**1.284.717.462.164,00**							**12.255.546.191,00**	

3.4. Cascading Kinerja Kecamatan Sukamulya

Kata *cascading* adalah sebuah kata dalam bahasa Inggris yang kata asalnya yaitu “to cascade” punya arti “menurun”. Dalam manajemen, istilah *cascading* juga diartikan sama yaitu menurun secara bertahap, bukan terjun sekaligus. *Cascading* dalam konteks manajemen adalah “menurun” yang direncanakan, dikendalikan, dimonitor dan diukur/ dinilai. Apa yang diturunkan harus dipastikan dan diyakinkan akan menghasilkan apa yang diinginkan dan akan kembali ke-“atas”.

Definisi lain juga menyebutkan bahwa *Cascading* (penjabaran) kinerja merupakan proses penjabaran dan penyelarasan kinerja dan target kinerja secara vertikal dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah.

Memperhatikan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2023 dan daerah otonom baru, maka bagi Bupati/Walikota yang masa jabatannya berakhir di Tahun 2023, untuk menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026. Serta Surat Bupati Tangerang Nomor:050.13/6473-Bappeda tanggal 30 Desember 2022 perihal Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2025-2026, yang dalam suratnya menyebutkan bahwa setiap Kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah) agar segera Menyusun Renja Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 sebagaimana yang tercantum pada tata cara dan tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah yang juga disertakan bersama surat tersebut, serta dalam penentuan tujuan dan sasaran Rancangan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 memperhatikan tujuan dan sasaran Rancangan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tangerang sebagaimana tercantum dalam lampiran 2 yang turut disertakan bersama surat tersebut.

Mengacu pada uraian diatas, maka Kecamatan Sukamulya turut menyertakan data/informasi perihal *Cashcading* Kecamatan Sukamulya yang disajikan pada Tabel 4.2 Cashcading Kinerja Kecamatan Sukamulya Tahun 2025 yang juga tercantum dalam dokumen Renstra Kecamatan Sukamulya Tahun 2024-2026.

Tabel 3.3
Tabel Cascading Kinerja Kecamatan Sukamulya Tahun 2025

TUJUAN	SASARAN	SASARAN PROGRAM	IKP (INDIKATOR KINERJA PROGRAM)	DEFINISI OPRASIONAL	OUTPUT	OUTCAME	TANGGUNG JAWAB
MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK KECAMATAN SUKAMULYA	Terpenuhinya pelayanan publik sesuai dengan standar kecamatan			Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)			
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar	Total terpenuhinya paten sesuai dengan standar/ total seluruh paten di masing-masing kecamatan x 100%	Jumlah laporan Pelayanan	Presentasi Terpenuhinya Jumlah laporan Pelayanan PATEN sesuai standar	KASI PELAYANAN
			Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara	Total infrastruktur dasar (penghubung desa) yang terpelihara / total infrastruktur dasar (penghubung desa) x 100%	Jumlah dokumen Pemeliharaan	presentasi terpenuhinya Jumlah dokumen Pemeliharaan fasilitas umum yang terpelihara	KASI PELAYANAN
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	(jumlah lembaga masyarakat yang mendapat pemberdayaan / jumlah lembaga pemberdayaan) x 100%	Jumlah Laporan pemberdayaan	presentasi dari Jumlah Laporan pemberdayaan yang terpenuhi	KASI PEMBERDAYAAN

		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	Total laporan trantibum yang difasilitasi / total seluruh laporan trantibum yang masuk x 100%	Jumlah Laporan gangguan trantibum	presentasi dari Jumlah Laporan gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	KASI TRANTIBUM
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase tertib administrasi pemerintahan desa	(jumlah desa yang tertib administrasi/Jumlah Desa)x100%	Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	presentasi laporan desa dengan administrasi baik	KASI BINWAS
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti /jumlah rekomendasi x 100%	Jumlah Rekomendasai yang dikeluarkan	Presentasi Rekomendasai yang dikeluarkan dan ditindaklanjuti	KASI PEMERINTAHAN
	MENINGKATNYA KUALITAS AKUNTABILITAS KINERJA			Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	presentasi pemenuhan Dokumen Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN
					Jumlah laporan keuangan	presentasi administrasi laporan keuangan	KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN

		Jumlah pegawai difasikitasi	Presentasi Aparatur Yang Meningkat Kapasitasnya	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	presentasi pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		Tersedianya Jasa Penunjang	presentasi Tersedianya Jasa Penunjang	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		Jumlah barang milik daerah	presentasi Jumlah barang milik daerah	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	presentasi dari Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Gambar 3.1
Gambaran Cascading Kinerja Kecamatan Sukamulya Tahun 2025



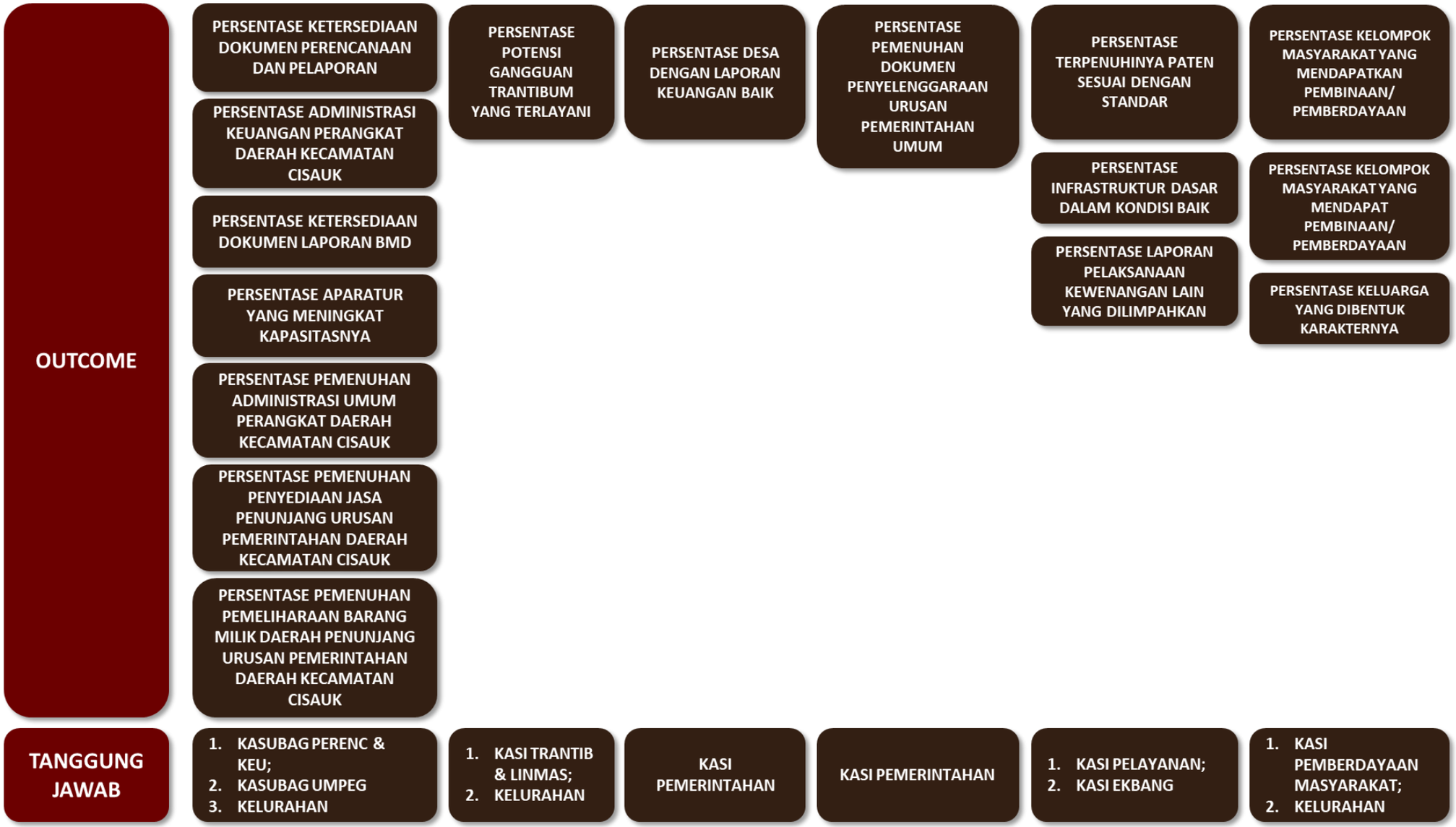
OUTCOME
PERSENTASE KETERSEDIAAN DOKUMEN PERENCANAAN DAN PELAPORAN
PERSENTASE ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN CISAUK
PERSENTASE KETERSEDIAAN DOKUMEN LAPORAN BMD
PERSENTASE APARATUR YANG MENINGKAT KAPASITASNYA
PERSENTASE PEMENUHAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH KECAMATAN CISAUK
PERSENTASE PEMENUHAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KECAMATAN CISAUK
PERSENTASE PEMENUHAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KECAMATAN CISAUK
PERSENTASE POTENSI GANGGUAN TRANTIBUM YANG TERLAYANI
PERSENTASE DESA DENGAN LAPORAN KEUANGAN BAIK
PERSENTASE PEMENUHAN DOKUMEN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
PERSENTASE TERPENUHINYA PATEN SESUAI DENGAN STANDAR
PERSENTASE INFRASTRUKTUR DASAR DALAM KONDISI BAIK
PERSENTASE LAPORAN PELAKSANAAN KEWENANGAN LAIN YANG DILIMPAHKAN
PERSENTASE KELOMPOK MASYARAKAT YANG MENDAPATKAN PEMBINAAN/ PEMBERDAYAAN
PERSENTASE KELOMPOK MASYARAKAT YANG MENDAPAT PEMBINAAN/ PEMBERDAYAAN
PERSENTASE KELUARGA YANG DIBENTUK KARAKTERNYA
TANGGUNG JAWAB
1. KASUBAG PERENC & KEU;
2. KASUBAG UMPEG
3. KELURAHAN
1. KASI TRANTIB & LINMAS;
2. KELURAHAN
KASI PEMERINTAHAN
KASI PEMERINTAHAN
1. KASI PELAYANAN;
2. KASI EKBANG
1. KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT;
2. KELURAHAN

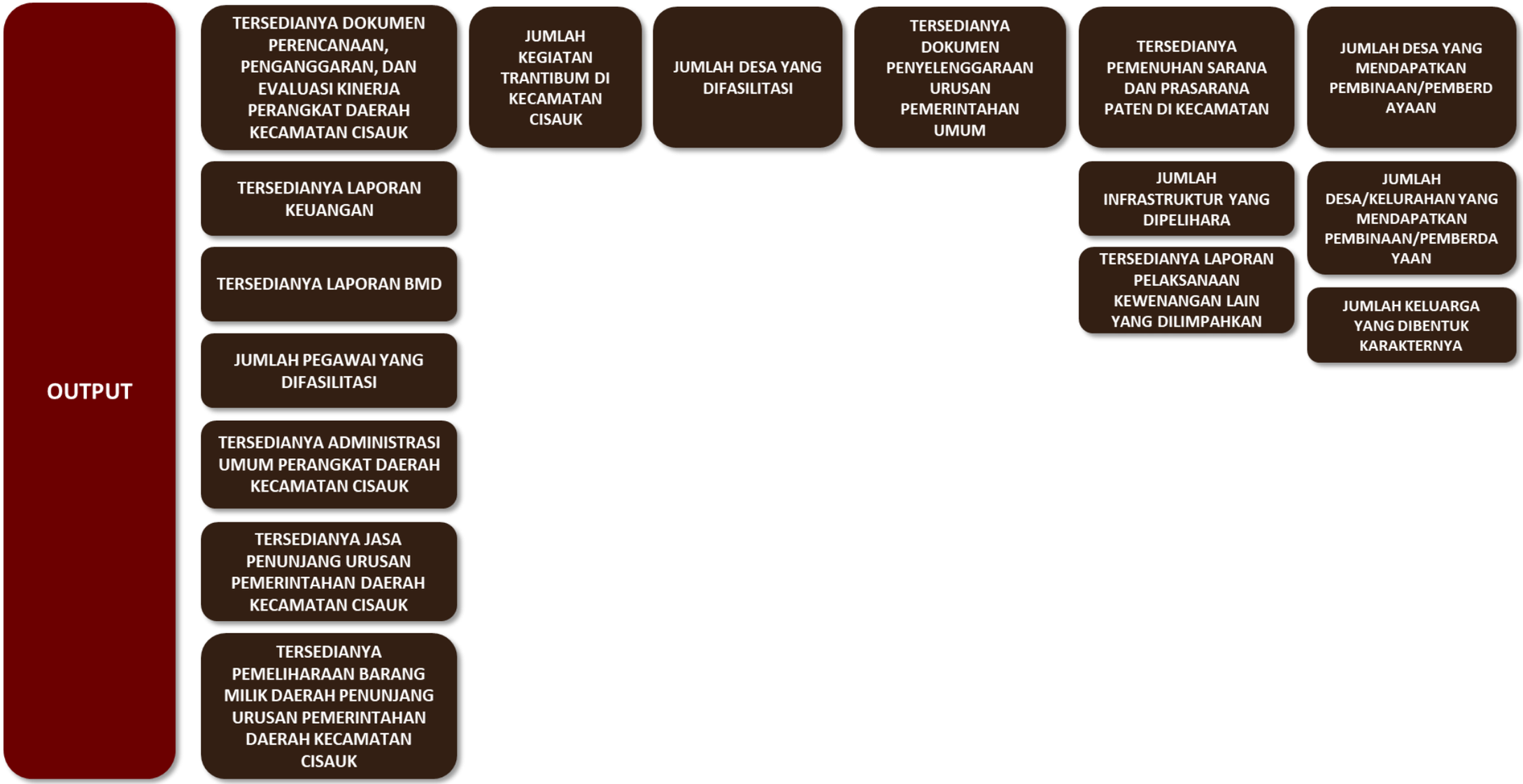
OUTPUT
TERSEDIANYA DOKUMEN PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH KECAMATAN CISAUK
TERSEDIANYA LAPORAN KEUANGAN
TERSEDIANYA LAPORAN BMD
JUMLAH PEGAWAI YANG DIFASILITASI
TERSEDIANYA ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH KECAMATAN CISAUK
TERSEDIANYA JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KECAMATAN CISAUK
TERSEDIANYA PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KECAMATAN CISAUK
JUMLAH KEGIATAN TRANTIBUM DI KECAMATAN CISAUK
JUMLAH DESA YANG DIFASILITASI
TERSEDIANYA DOKUMEN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
TERSEDIANYA PEMENUHAN SARANA DAN PRASARANA PATEN DI KECAMATAN
JUMLAH INFRASTRUKTUR YANG DIPELIHARA
TERSEDIANYA LAPORAN PELAKSANAAN KEWENANGAN LAIN YANG DILIMPAHKAN
JUMLAH DESA YANG MENDAPATKAN PEMBINAAN/PEMBERDAYAAN
JUMLAH DESA/KELURAHAN YANG MENDAPATKAN PEMBINAAN/PEMBERDAYAAN
JUMLAH KELUARGA YANG DIBENTUK KARAKTERNYA

Gambar.3.2
Gambaran Pohon Kinerja Kecamatan Sukamulya Tahun 2025

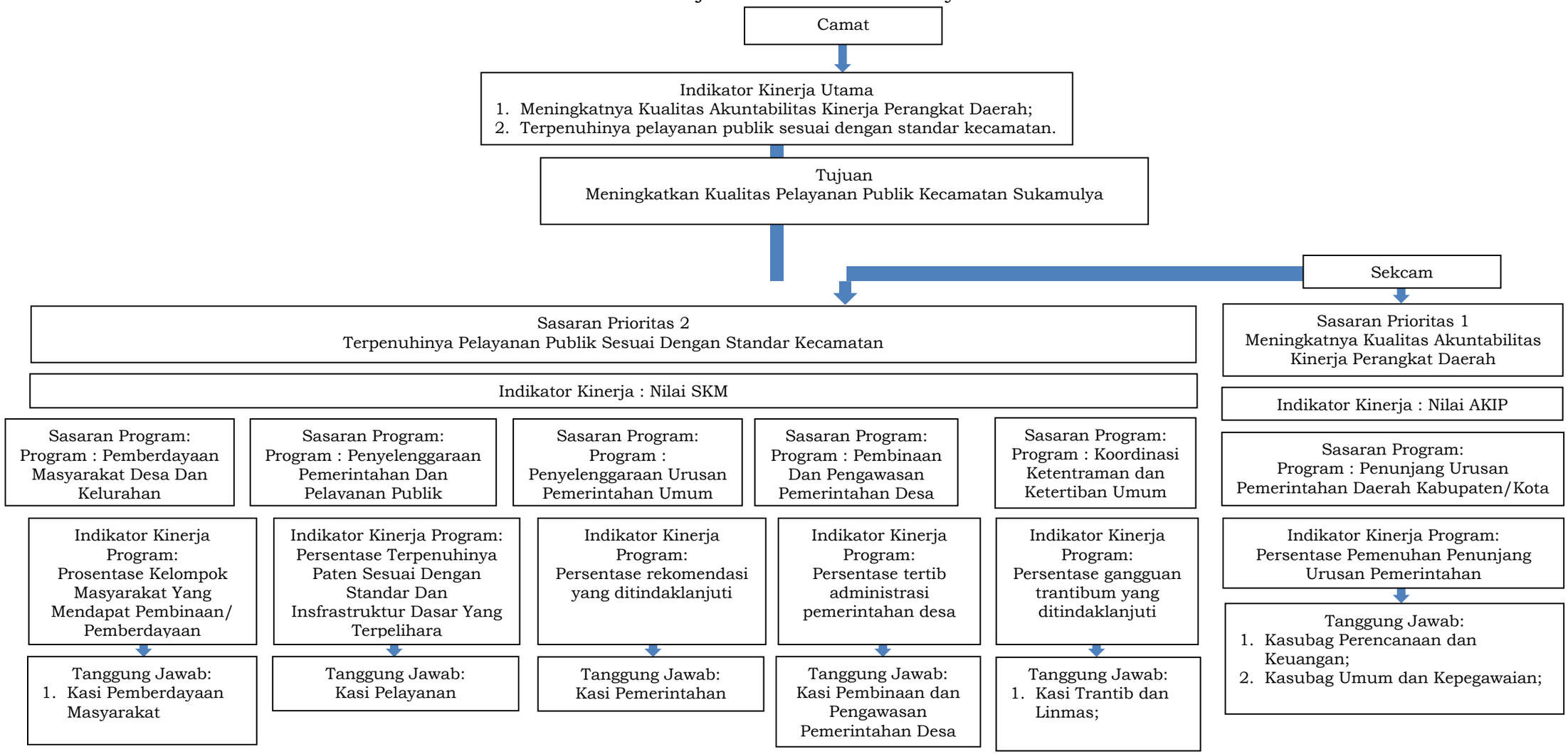

BAB IV
PENUTUP

Dokumen Rencana Kerja Perubahan (Renja) Kecamatan Sukamulya Kabupaten Tangerang Tahun 2025 ini merupakan pelaksanaan dari RPD (Rencana Pembangunan Daerah) Kabupaten Tangerang 2024-2026 yang disusun melalui penerapan perencanaan partisipatif dengan melibatkan segenap komponen *stakeholder*. Implementasi Rencana Kerja Perubahan (Renja) Kecamatan Sukamulya Kabupaten Tangerang Tahun 2025 yang lebih konkrit akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Sukamulya serta dalam KUA/PPAS (Kebijakan Umum Anggaran/Prioritas Plafon Anggaran Sementara) setiap tahunnya yang tertuang dalam APBDP.

Guna mempertahankan kesinambungan pembangunan rencana pembangunan Kecamatan Sukamulya Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026 (Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026) yang diperlukan sebagai pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025-2026, maka pada tahun 2025 sudah mulai disiapkan dokumen Renja untuk Tahun Anggaran 2025. Agenda pembangunan diarahkan untuk menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang belum seluruhnya teratasi sampai dengan tahun 2025 dan masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi dalam tahun 2025. Kegiatan tersebut tidak akan berjalan baik jika tidak didukung dana atau anggaran yang memadai.

Demikian Rencana Kerja Perubahan (Renja) ini dibuat untuk perencanaan kegiatan 1 *(satu)* tahun kedepan.

60. Kecamatan Gunung Kaler

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana kerja merupakan merupakan rencana kerja tahunan yang menjabarkan pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan dalam Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA). Renja SKPD Kecamatan Gunung Kaler mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Sebagai tolak ukur keberhasilan pembangunan dengan memperhatikan Program Unggulan Kabupaten Tangerang sebagai indikator keberhasilan dan evaluasi kebijakan pembangunan.

Dalam konteks pelaksanaan pembangunan Kecamatan Gunung Kaler dituntut untuk mampu melaksanakan tugas dan kewenangan yang telah diberikan Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan pembangunan yang ada di Kecamatan Gunung Kaler sesuai dengan aspirasi masyarakat. Ini semua demi kesejahteraan masyarakat Kecamatan Gunung Kaler.

Proses penysusunan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang berdasarkan kepada Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Gunung Kaler dengan tetap memperhatikan program prioritas, agar didalam pelaksanaan program/ kegiatan terwujud sinergitas antar dokumen perencanaan, sehingga dapat memenuhi indikator keberhasilan yang telah ditetapkan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Gunung Kaler adalah :

1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286);
2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tamgbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 No. 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4437) ;
4. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 33 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan.
8. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 16 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dalam mewujudkan efisiensi dalam pembangunan daerah.

Tujuannya adalah agar dokumen perencanaan yang disusun dapat dijadikan acuan oleh berbagai pihak yang akan melaksanakan kegiatan di Kecamatan Gunung Kaler sehingga terwujud sinergitas antar pemangku kewenangan yang ada di Kecamatan Gunung Kaler. Dan dapat dijadikan bahan evaluasi bagi Kabupaten dalam pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Gunung Kaler serta dapat dijadikan bahan evaluasi bagi camat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pada tahun ini.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025
- 2.1 Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Gunung Kaler
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Gunung Kaler
- 2.4 Review Terhadap Rancangan RKPD Perubahan
- 2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN GUNUNG KALER

BAB IV PENUTUP

4.1 Catatan Penting

4.2 Kaidah Pelaksanaan

4.3 Rencana Tindak Lanjut

BAB II
EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1 EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

Proses penyusunan suatu perencanaan erat kaitannya dengan proses evaluasi, dari hasil evaluasi dapat teridentifikasi dua hal yaitu sejauh mana proses perencanaan pembangunan dilaksanakan oleh SKPD dan permasalahan-permasalahan yang menghambat pelaksanaan perencanaan pembangunan tersebut. Hasil evaluasi tersebut sangat penting sebagai masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan pada tahun yang akan datang.

Rencana Strategis Kecamatan Gunung Kaler Tahun 2024-2026 yang memuat indikator keberhasilan suatu proses perencanaan pembangunan untuk kurun waktu 3 (tiga) tahun, dijadikan tolak ukur untuk menilai sejauh mana perencanaan pembangunan telah dilaksanakan. Renstra tersebut merupakan panduan Kecamatan Gunung Kaler dalam melaksanakan program dan kegiatannya.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024, Kecamatan Gunung Kaler melaksanakan program dan kegiatan dengan dukungan anggaran bersumber dari APBD Kabupaten Tangerang, kemudian pada saat anggaran perubahan (APBD-P) tahun 2024 menjadi sebesar Rp 18.023.085.468,00 (delapan belas milyar dua puluh tiga juta delapan puluh lima ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah), dengan Realisasi Anggaran sebesar Rp 17.916.740.527,00 (tujuh belas milyar sembilan ratus enam belas juta tujuh ratus empat puluh ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah) atau persentase realisasi sebesar 99,41%.

Adanya sisa anggaran tersebut dikarenakan adanya efisiensi dari berbagai kegiatan yang tidak semua terserap, antara lain pada sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, penyerapan anggaran pada sub kegiatan ini tidak mencapai 100% dikarenakan efisiensi anggaran yang disebabkan oleh proses penawaran pada saat pengadaan langsung dengan pihak ketiga. Selain itu, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, penyerapan anggaran pada sub kegiatan ini tidak tercapai 100% dikarenakan adanya penambahan anggaran pada belanja tagihan listrik sebagai antisipasi adanya penambahan tarif dasar listrik dan penambahan daya listrik kemudian direalisasikan sesuai dengan kebutuhan.

Kemudian penyediaan gaji dan tunjangan ASN, kurang optimal penyerapan anggarannya yaitu pada belanja gaji pokok PNS, Belanja Tunjagan Keluarga PNS, Belanja Jaminan Kematian PNS. Hal ini disebabkan karena adanya penambahan anggaran pada belanja pegawai sebagai antisipasi adanya kenaikan gaji berkala yang tertunda di Kecamatan Gunung Kaler. Selain itu, belanja yang tidak dilakukan penyerapan yaitu Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS, hal ini disebabkan belum ada kebijakan pencairan anggaran dari Pemerintah Daerah.

Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang pada Tahun Anggaran 2025 memiliki Pagu Murni sebesar Rp 18.730.135.049,00 (delapan belas milyar tujuh ratus tiga puluh juta seratus tiga puluh lima ribu empat puluh sembilan rupiah). Kemudian pada bulan

Maret dilakukan efisiensi anggaran sesuai dengan INPRES Nomor 1 Tahun 2025 menjadi Rp 18.116.737.439,00 (delapan belas milyar seratus enam belas juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah). Realisasi Anggaran sampai dengan Triwulan I tahun 2025 sebesar Rp 4.634.513.939,00 (empat milyar enam ratus tiga puluh empat juta lima ratus tiga belas ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah) atau persentase realisasi sebesar 25,58%. Diharapkan Realisasi Belanja tahun 2025 dapat tercapai dan dapat menyerap anggaran sesuai dana yang diberikan. Pada tahun 2025 sampai dengan Triwulan I secara keseluruhan program dan kegiatan serta sub kegiatan telah mencapai target dari Indikator Kinerja Utama Tahun 2025. Pada saat proses penyusunan RKPD Perubahan bulan April 2025, Kecamatan Gunung Kaler memperoleh tambahan anggaran sebesar Rp 329.432.338,00, sehingga total anggaran pada RKPD Perubahan 2025 sebesar Rp 18.446.169.777 (delapan belas milyar empat ratus empat puluh enam juta seratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah)

Berikut akan disajikan Tabel Review Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Gunung Kaler tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra Kecamatan Gunung Kaler, yang bertujuan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra SKPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Review didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya dan perkiraan pelaksanaan DPA Kecamatan Gunung Kaler tahun berjalan (tahun 2025). Adapun gambaran selengkapnya tentang evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Gunung Kaler tahun 2025 sampai dengan triwulan 1 disajikan sebagaimana tabel 1 (Tabel T- C.29) berikut:

Tabel 1
Tabel T-C.29. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025
Kabupaten Tangerang

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Gunung Kaler

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan 2025 (Renja Perangkat Daerah tahun 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7.1.4	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti**	**Persen**	**100**	**0**	**25**	**25**	**100%**	**100**	**75**	**75%**
7.1.4.2.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terkoordinasinya kegiatan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	Dokumen	12	0	4	4	100%	4	8	67%
7.1.4.2.03.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatanJumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesiadan InstansiVertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	0	4	4	100%	4	8	67%
7.1.5	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti**	**Persen**	**100**	**0**	**25**	**25**	**100%**	**100**	**75**	**75%**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan 2025 (Renja Perangkat Daerah tahun 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7.1.5.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan kepala Daerah	Jumlah urusan pemerintahan umum sesuai dengan penugasan Kepala Daerah	Dokumen	9	0	3	3	100%	3	6	67%
7.1.5.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemerintahan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang	50	0	50	50	100%	50	50	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan 2025 (Renja Perangkat Daerah tahun 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7.1.5.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Orang	50	0	50	50	100%	50	50	100%
7.1.5.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah dokumen Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	1	0	1	1	100%	1	1	100%
7.1.6	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase tertib administrasi pemerintahan desa**	**Persen**	**100**	**0**	**25**	**25**	**100%**	**100**	**75**	**75%**
7.1.6.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa dengan laporan keuangan baik	Desa	27	0	9	9	100%	9	18	67%
7.1.6.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	27	0	9	9	100%	9	18	67%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan 2025 (Renja Perangkat Daerah tahun 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7.1.2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar**	**persen**	**100**	**0**	**25**	**25**	100%	**100**	**75**	**75%**
7.1.2.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Pemenuhan sarana dan prasarana Paten di Kecamatan	Jenis	9	0	3	3	100%	3	6	67%
7.1.2.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamata	Laporan	6	0	2	2	100%	2	4	67%
7.1.2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara**	**persen**	**100**	**0**	**25**	**25**	**100%**	**100**	**75**	**75%**
7.1.2.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah infrastruktur yang dipelihara	titik	300	0	100	100	100%	100	200	67%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan 2025 (Renja Perangkat Daerah tahun 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7.1.2.2.03.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umu	Dokumen	15	0	5	5	100%	5	10	67%
7.1.3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan**	**Persen**	**100**	**0**	**25**	**25**	100%	**100**	**75**	**75%**
7.1.3.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan/pemberdayaan	Kelompok	37	0	13	13	100%	13	26	70%
7.1.3.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga	30	0	10	10	100%	10	20	67%
7.1.3.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	18	0	6	6	100%	6	12	67%
7.1.1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan**	**Persen**	100	0	50	50	100%	25	75	75%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan 2025 (Renja Perangkat Daerah tahun 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	**Persen**	100	0	50	50	100%	25	75	75%
7.1.1.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	18	0	6	6	100%	6	12	67%
7.1.1.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	15	0	5	5	100%	5	10	67%
7.1.1.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	3	0	1	1	100%	1	2	67%
7.1.1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan	Dokumen	6	0	2	2	100%	2	4	67%
7.1.1.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	57	0	19	19	100%	19	38	67%
7.1.1.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan	Laporan	3	0	1	1	100%	1	2	67%
7.1.1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang difasilitas	Orang	57	0	19	19	100%	19	38	67%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan 2025 (Renja Perangkat Daerah tahun 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7.1.1.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	57	0	19	19	100%	19	38	67%
7.1.1.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, danPenilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	57	0	19	19	100%	19	38	67%
7.1.1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jenis	18	0	6	6	100%	6	12	67%
7.1.1.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	15	0	5	5	100%	5	10	67%
7.1.1.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	30	0	10	9	90%	10	19	63%
7.1.1.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	15	0	5	5	100%	5	10	67%
7.1.1.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	75	0	25	18	72%	25	43	57%
7.1.1.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	30	0	10	9	90%	10	19	63%
7.1.1.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	0	4	4	100%	4	8	67%
7.1.1.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah LaporanPenyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	0	4	4	100%	4	8	67%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan 2025 (Renja Perangkat Daerah tahun 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7.1.1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang	Jenis	18	0	6	6	100%	6	12	67%
7.1.1.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	Orang	3	0	1	1	100%	1	2	67%
7.1.1.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Paket	6	0	2	2	100%	2	4	67%
7.1.1.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	Orang	39	0	13	13	100%	13	26	67%
7.1.1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis	9	0	3	3	100%	3	6	67%
7.1.1.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasionalatau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	21	0	7	7	100%	7	14	67%
7.1.1.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelhara	Unit	90	0	30	30	100%	30	60	67%
7.1.1.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	9	0	3	3	100%	3	6	67%

Berdasarkan tabel 1 (T-C.29.) di atas, dapat diketahui realisasi yang telah memenuhi target kinerja yaitu:

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, capaian kinerja tercapai semua kegiatan terserap dengan baik dan berjalan semua.
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, capaian kinerja tercapai semua kegiatan terserap dengan baik dan berjalan semua.
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, capaian kinerja tercapai semua kegiatan terserap dengan baik dan berjalan semua.
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, capaian kinerja tercapai semua kegiatan terserap dengan baik dan berjalan semua.
5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, capaian kinerja tercapai semua kegiatan terserap dengan baik dan berjalan semua.
6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, capaian kinerja tercapai semua kegiatan terserap dengan baik dan berjalan semua.
7. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan, capaian kinerja tercapai semua kegiatan terserap dengan baik dan berjalan semua.
8. Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum, capaian kinerja tercapai semua kegiatan terserap dengan baik dan berjalan semua.
9. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, capaian kinerja tercapai semua kegiatan terserap dengan baik dan berjalan semua.
10. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, capaian kinerja tercapai semua kegiatan terserap dengan baik dan berjalan semua.
11. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah, capaian kinerja tercapai semua kegiatan terserap dengan baik dan berjalan semua.
12. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Sub Kegiatan, capaian kinerja tercapai semua kegiatan terserap dengan baik dan berjalan semua.

Adapun evaluasi keuangan Kecamatan Gunung Kaler sampai dengan Triwulan ke I Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini Tabel 2 (Tabel E.81):

Tabel 2 (Tabel E.81)
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten Tangerang
Renja Perangkat Daerah Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang
Periode Pelaksanaan : Triwulan 1 Tahun 2025

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024-2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (%)		unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Terpenuhinya pelayanan publik sesuai dengan standar kecamatan																	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	**Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan**	**100**	**17.700.000.000,00**	**100**	**16.718.013.237**	**100**	**7.077.126.843**	**25**	**2.026.513.229**	**25**	**2.026.513.229,00**	**125**	**18.744.526.466,00**	**125**	**105,90**	**Kecamatan Gunung Kaler**
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**6**	**270.000.000,00**	**14**	**244.597.670**	**6**	**127.053.070**	**1**	**35.101.450**	**1**	**35.101.450,00**	**15**	**279.699.120,00**	**250**	**103,59**	**Kecamatan Gunung Kaler**
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	195.000.000,00	13	91.685.160	5	63.396.490	1	17.702.450	1	17.702.450,00	14	109.387.610,00	280	56,10	Kecamatan Gunung Kaler
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	75.000.000,00	4	152.912.510	1	63.656.580	1	17.399.000	1	17.399.000,00	5	170.311.510,00	500	227,08	Kecamatan Gunung Kaler

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024-2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (%)		unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Tersedianya laporan keuangan**	**2**	**12.975.000.000,00**	**6**	**10.886.677.736**	**2**	**4.933.769.646**	**1**	**1.267.335.394**	**1**	**1.267.335.394,00**	**7**	**12.154.013.130,00**	**350,00**	**93,67**	**Kecamatan Gunung Kaler**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19	12.900.000.000,00	76	10.814.581.080	19	4.871.309.306	19	1.244.384.394	19	1.244.384.394,00	95	12.058.965.474,00	500	93,48	Kecamatan Gunung Kaler
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1	75.000.000,00	4	72.096.656	1	62.460.340	1	22.951.000	1	22.951.000,00	5	95.047.656,00	500,00	126,73	Kecamatan Gunung Kaler
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Jumlah pegawai yang difasilitasi**	**19**	**260.000.000,00**	**76**	**397.183.000**	**19**	**120.364.000**	**19**	**57.030.000**	**19**	**57.030.000,00**	**95**	**454.213.000,00**	**500,00**	**174,70**	**Kecamatan Gunung Kaler**
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	19	100.000.000,00	38	117.400.000	19	60.862.000	19	57.030.000	19	57.030.000,00	57	174.430.000,00	300,00	174,43	Kecamatan Gunung Kaler
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	19	160.000.000,00	57	279.783.000	19	59.502.000	-	0	0	-	57	279.783.000,00	300,00	174,86	Kecamatan Gunung Kaler
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	7	1.737.000.000,00	18	2.886.547.020	7	379.094.700	1	323.386.000	1	323.386.000,00	19	3.209.933.020,00	271,43	184,80	Kecamatan Gunung Kaler
		Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi	5	7.000.000,00	15	50.064.000	5	18.691.800	5	18.450.000	5	18.450.000,00	20	68.514.000,00	400,00	978,77	Kecamatan Gunu

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024-2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (%)		unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan															ng Kaler
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10	900.000.000,00	40	2.096.584.000	10	136.258.900	10	134.000.000	10						
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5	160.000.000,00	10	99.800.000	5	65.711.000	5	64.700.000	5	64.700.000,00	15	164.500.000,00	300,00	102,81	Kecamatan Gunung Kaler
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2	250.000.000,00	8	306.444.000	2	67.866.000	2	65.565.000	2	65.565.000,00	10	372.009.000,00	500	148,80	Kecamatan Gunung Kaler
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	55.000.000,00	6	69.690.020	2	24.980.000	2	24.260.000	2	24.260.000,00	8	93.950.020,00	400	170,82	Kecamatan Gunung Kaler
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4	115.000.000,00	10	139.480.000	4	54.367.000	1	13.606.000	1	13.606.000,00	11	153.086.000,00	275	133,12	Kecamatan Gunung Kaler
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	250.000.000,00	30	124.485.000	12	11.220.000	3	2.805.000	3	2.805.000,00	33	127.290.000,00	275	50,92	Kecamatan Gunung Kaler
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Tersedianya Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah**	**3**	**1.530.000.000,00**	**9**	**1.463.120.161**	**3**	**1.124.952.192**	**1**	**271.090.885**	**1**	**271.090.885,00**	**10**	**1.734.211.046,00**	**333,33**	**113,35**	**Kecamatan Gunung Kaler**
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	75.000.000,00	30	43.890.000	1	3.704.590	-	0	0	-	30	43.890.000,00	3000	58,52	Kecamatan Gunung Kaler
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,	2	385.000.000,00	30	318.745.161	12	144.198.034	3	31.342.385	3	31.342.385,00	33	350.087.546,00	1650	90,93	Kecamatan Gunung Kaler

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024-2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (%)		unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan															
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13	1.070.000.000,00	32	1.100.485.000	12	977.049.568	3	239.748.500	3	239.748.500,00	35	1.340.233.500,00	269,2307692	125,26	Kecamatan Gunung Kaler
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**4**	**928.000.000,00**	**10**	**839.887.650**	**4**	**391.893.235**	**1**	**72.569.500**	**1**	**72.569.500,00**	**11**	**912.457.150,00**	**275**	**98,33**	**Kecamatan Gunung Kaler**
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5	600.000.000,00	18	484.767.650	5	231.702.460	5	60.869.500	5	60.869.500,00	23	545.637.150,00	460,00	90,94	Kecamatan Gunung Kaler
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30	85.000.000,00	90	49.380.000	30	30.600.000	30	11.700.000	30	11.700.000,00	120	61.080.000,00	400	71,86	Kecamatan Gunung Kaler
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	243.000.000,00	5	305.740.000	2	129.590.775	-	0	0	-	5	305.740.000,00	250	125,82	Kecamatan Gunung Kaler
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar**	**100**	**15.000.000.000,00**	**250**	**17.730.753.960**	**100**	**8.112.829.031**	**25**	**1.506.721.450**	**25**	**1.506.721.450,00**	**275**	**19.237.475.410,00**	**275**	**128,25**	**Kecamatan Gunung Kaler**
			Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara	**100**		**250**		**100**		**25**		**25**	-	**275**	-	**275**		**Kecamatan Gunung Kaler**

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024-2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (%)		unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	**Pemenuhan sarana dan prasarana Paten di Kecamatan**	**3**	**570.000.000,00**	**8**	**625.509.000**	**3**	**23.882.000**	**1**	**8.046.000**	**1**	**8.046.000,00**	**9**	**633.555.000,00**	**300**	**111,15**	**Kecamatan Gunung Kaler**
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2	570.000.000,00	6	625.509.000	2	23.882.000	1	8.046.000	1	8.046.000,00	7	633.555.000,00	350	111,15	Kecamatan Gunung Kaler
		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	**Jumlah infrastruktur yang dipelihara**	**100**	**14.430.000.000,00**	**255**	**17.105.244.960**	**100**	**8.088.947.031**	**25**	**1.498.675.450**	**25**	**1.498.675.450,00**	**280**	**18.603.920.410,00**	**280**	**128,93**	**Kecamatan Gunung Kaler**
		Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	5	14.430.000.000,00	13	17.105.244.960	5	8.088.947.031	1	1.498.675.450	1	1.498.675.450,00	14	18.603.920.410,00	280,00	128,93	Kecamatan Gunung Kaler
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Prosentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan**	**100**	**3.600.000.000,00**	**250**	**4.575.086.880**	**100**	**2.286.672.035**	**25**	**902.246.430**	**25**	**902.246.430,00**	**275**	**5.477.333.310,00**	**275,00**	**152,15**	**Kecamatan Gunung Kaler**
		Koordinasi Kegiatan	**Jumlah kelompok**	**13**	**3.600.000.000,00**	**33**	**4.575.086.880**	**13**	**2.286.672.035**	**3**	**902.246.430**	**3**	**902.246.430,00**	**36**	**5.477.333.310,00**	**276,9230769**	**152,15**	**Kecamata**

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024-2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (%)		unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pemberdayaan Desa	**masyarakat yang mendapatkan pembinaan/pemberdayaan**															**n Gunung Kaler**
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10	180.000.000,00	40	430.436.800	10	117.488.750	10	117.027.050	10	117.027.050,00	50	547.463.850,00	500	304,15	Kecamatan Gunung Kaler
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6	3.420.000.000,00	15	4.144.650.080	6	2.169.183.285	1	785.219.380	1	785.219.380,00	16	4.929.869.460,00	266,6666667	144,15	Kecamatan Gunung Kaler
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti**	**100**	**1.110.000.000,00**	**250**	**454.967.160**	**100**	**80.415.880**	**25**	**27.547.880**	**25**	**27.547.880,00**	**275**	**482.515.040,00**	**275**	**43,47**	**Kecamatan Gunung Kaler**
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraan dan Ketertiban Umum**	**4**	**1.110.000.000,00**	**10**	**454.967.160**	**4**	**80.415.880**	**1**	**27.547.880**	**1**	**27.547.880,00**	**11**	**482.515.040,00**	**275**	**43,47**	**Kecamatan Gunung Kaler**
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4	1.110.000.000,00	10	454.967.160	3	80.415.880	1	27.547.880	1	27.547.880,00	11	482.515.040,00	275	43,47	Kecamatan Gunung Kaler

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024-2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (%)		unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti**	**100**	**930.000.000,00**	**250**	**988.149.357**	**100**	**414.721.290**	**25**	**126.742.080**	**25**	**126.742.080,00**	**275**	**1.114.891.437,00**	**275**	**119,88**	**Kecamatan Gunung Kaler**
			Persentase tertib administrasi pemerintahan desa			**20**	**988.149.357**	**100**		**25**		**25**	**-**	**45**	**988.149.357,00**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**Kecamatan Gunung Kaler**
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Terselenggaranya urusan pemerintahan umum sesuai dengan penugasan Kepala Daerah**	**9**	**930.000.000,00**	**200**	**256.100.360**	**9**	**414.721.290**	**1**	**126.742.080**	**1**	**126.742.080,00**	**201**	**382.842.440,00**	**2233,333333**	**41,17**	**Kecamatan Gunung Kaler**
		Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	50	330.000.000,00	250	335.900.997	50	231.047.520	50	10.200.000	50	10.200.000,00	300	346.100.997,00	600	104,88	Kecamatan Gunung Kaler
		Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan	Jumlah Orang yang Mengikuti	50	330.000.000,00	5	396.148.000	50	78.885.650	50	64.309.650	50	64.309.650,00	55	460.457.650,00	110,00	139,53	Kecamatan Gunu

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024-2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (%)		unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional															ng Kaler
		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah dokumen Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1	330.000.000,00	250	**430.021.620**	1	104.788.120	1	52.232.430	1	52.232.430,00	251	482.254.050,00	25100	146,14	Kecamatan Gunung Kaler
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**Persentase pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa**	**100**	**630.000.000,00**	**19**	**430.021.620**	**100**	**144.972.360**	**25**	**44.742.870**	**25**	**44.742.870,00**	**44**	**474.764.490,00**	**44**	**75,36**	**Kecamatan Gunung Kaler**
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa**	**9**	**630.000.000,00**	**19**	**430.021.620**	**9**	**144.972.360**	**1**	**44.742.870**	**1**	**44.742.870,00**	**20**	**474.764.490,00**	**222,2222222**	**75,36**	**Kecamatan Gunung Kaler**
		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	9	630.000.000,00	3	147.240.000,00	9	144.972.360	1	44.742.870	1	44.742.870,00	4	191.982.870,00	44,44444444	30,47	Kecamatan Gunung Kaler
					38.970.000.000,00		40.896.992.214,00		18.116.737.439,00		4.634.513.939,00		4.634.513.939,00		45.531.506.153,00		116,84	

Berdasarkan tabel 2 (Tabel E.81) Evaluasi Terhadap Hasil Renja Kecamatan Gunung Kaler sampai dengan Triwulan ke 1 Tahun 2025, berikut analisis dari tabel tersebut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, beberapa kegiatan yang menunjang sasaran kinerja telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai anggaran kas. Terdapat tiga kegiatan yang masih belum dilaksanakan dikarenakan kegiatan ini direncanakan akan dilaksanakan pada triwulan 3.
2. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum, seluruh kegiatan terserap dengan baik dan sesuai anggaran kas.
3. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa sudah mencapai target kinerja 4 desa yang dilakukan pengasawan dan pembinaan sampai dengan triwulan II ini sudah melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap 4 desa tersebut.
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, seluruh kegiatan terserap dengan baik dan sesuai anggaran kas.
5. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, seluruh kegiatan terserap dengan baik dan sesuai anggaran kas.
6. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, seluruh kegiatan terserap dengan baik dan sesuai anggaran kas.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Gunung Kaler

Perangkat Daerah Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang, merupakan Lembaga Teknis Daerah sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah dalam perencanaan pembangunan. Pencanangan pembangunan yang berkualitas dan professional dapat menjadi wahana untuk memperbaiki pola pembangunan di tingkat daerah, sehingga daerah dapat berkiprah dengan leluasa untuk membangun daerahnya sesuai potensi dan kemampuan yang ada (potensi lokal).

Perangkat Daerah Kecamatan Gunung Kaler yang berfungsi sebagai Perangkat Daerah Koordinatif dan Pelayanan masyarakat mempunyai tujuan utamanya adalah untuk kepuasan pelayanan masyarakat secara umum, capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Gunung Kaler dapat dicapai bila Indeks Kepuasan Masyarakat tercapai sesuai dengan target. Untuk mendapatkan kepuasan Masyarakat dengan Indeks Kepuasan Masyarakat yang tinggi perlu adanya Standar Pelayanan Minimal (SPM) karena SPM merupakan tolok ukur bagi aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.



Kegiatan pelayanan di Kecamatan Gunung Kaler tidak hanya memberikan sarana dan prasarana yang baik untuk masyarakat, namun juga memberikan pelayanan prima dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

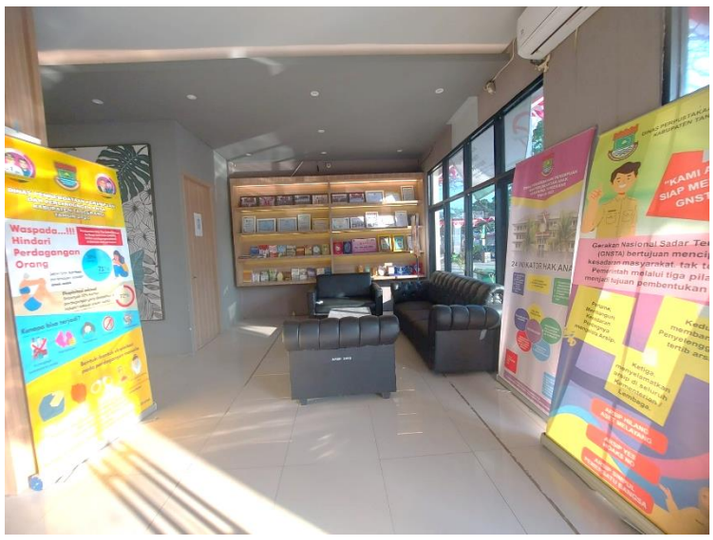

Pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Gunung Kaler dapat dilihat sebagaimana Tabel 3 (T-C.30) berikut :

Tabel 3 (T-C.30)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Kabupaten Tangerang

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Gunung Kaler

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisassi Capaian	Proyeksi	Catatan Analisis
			2024	2025	2026	2024	2025	
1	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	Nilai	89,26	89,27	89,28	80,2	80,3	
2	Nilai AKIP	Nilai	60,8	60,9	61	60,75	60,8	

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Gunung Kaler Tahun 2024 sebagai berikut :

1. Capaian kinerja belum memenuhi target ditunjukan pada indikator Indeks Kepuasan Masyarakat, dengan capaian kinerja 80,2 %.
2. Capaian kinerja belum mencapai target ditunjukkan pada indikator Nilai AKIP Kecamatan Gunung Kaler, dengan capaian kinerja 60,75 %.

Adapun beberapa hal yang perlu dilakukan untuk keberhasilan pelaksanaan dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, antara lain :

1. Memberikan pelatihan bagi pegawai sesuai dengan bidang tugasnya.
2. Meningkatkan sistem pelayanan di Kecamatan Gunung Kaler dengan cara berkoordinasi dengan Dinas terkait.
3. Meningkatkan kualitas ruang pelayanan untuk meningkatkan kenyamanan dan kebersihan ruang pelayanan.
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Gunung Kaler

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Gunung Kaler bahwa ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut :

1. Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Tangerang kepada Camat di bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Tangerang;
2. Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur;
3. Pelayanan Prima. Kecamatan sebagai salah satu SKPD di Pemerintah Kabupaten Tangerang yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamikan aktivitas masyarakat;
4. Peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dan segala kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan, karena tidak mungkin terwujud suatu pelaksanaan kegiatan dan pembangunan tanpa dukungan masyarakat. Karena semua yang dilaksanakan oleh Kecamatan tujuannya adalah demi kepentingan masyarakat di Kecamatan Gunung Kaler. Peran serta masyarakat yang sekarang ini terlibat dalam kegiatan yaitu kegiatan musrenbang, fasilitasi pemeliharaan kebersihan dan kegiatan PNPM;
5. Ketahanan pangan masyarakat yang harus dikuatkan melalui pertanian dan peternakan, sehingga perlu adanya pelatihan-pelatihan kepada masyarakat baik yang menyangkut tehnik di lapangan maupun pemasarannya serta perlunya dukungan peralatan yang memadai demi meningkatkan hasil dari pertanian dan peternakan. Dan pendukung pengairan pertanian masyarakat yang dangat diperhatikan demi

mendukung peningkatan kualitas pertanian;

6. Dunia usaha dan investasi yang kian hari semakin berkembang perlu dipersiapkan sumber daya manusia yang mampu bersaing dalam dunia usaha dan sesuai dengan kebutuhan industri, sehingga masyarakat Gunung Kaler dapat menempati posisi-posisi yang telah disediakan oleh perusahaan sehingga akan meningkatkan tarap perekonomian masyarakat. Sehingga jumlah masyarakat miskin di Kecamatan Gunung Kaler dapat berkurang;
7. Akses ke kota Kecamatan dan pada pelayanan pendidikan dan kesehatan yang semakin memadai dapat dinikmati masyarakat, sehingga tidak ada masyarakat yang tidak merasakan pelayanan kesehatan dan pendidikan. Dan infrasturuktur pendidikan serta kesehatan yang terus dibenahai sehingga masyarakat akan merasa nyaman dalam mendapatkan pelayananannya.

Untuk menjawab isu isu di kecamatan Gunung Kaler maka dibentuklah beberapa kebijakan perencanaan kegiatan di kecamatan Gunung Kaler adalah sebagai berikut :

1. Gerakan Bersama Atasi Kemiskinan Ekstream dan Stunting (Gebrak Tegas) Pencegahan dan penurunan Stunting dan penghapusan kemiskinan ekstream berupa Pemberian Makanan Tambahan (PMT) balita Stunting, rembuk stunting.
2. Penyelenggaraan pemberdayaan keluarga prasejahtera.
3. Verifikasi dan validasi data pengangguran.
4. Kecamatan tanggap bencana dan penanganan pasca bencana.
5. Pengembangan Produk Unggulan Kecamatan, melalui Pembinaan UMKM.
6. Pengembangan Inovasi Kecamatan.
7. Pengembangan Kampung Tematik.
8. Pengelolaan Sampah berupa Pembentukan Bank Sampah, Bio Konversi dan Sirkular Ekonomi.
9. Penyediaan RTH (Ruang Terbuka Hijau).
10. Rehabilitasi RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) dan Rehabilitas yang terdampak bencana.
11. Pemeliharaan Stadion Mini.
12. Pengangkutan sampah dari tempat pembuangan sampah sementara sampai tiba di tempat pembuangan sampah di akhir untuk wilayah sekitar jalan desa/kelurahan.

2.4 Review Terhadap Rancangan RKPD Perubahan

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Gunung Kaler Tahun 2024 merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam arah kebijakan RPJPD Kabupaten Tangerang tahun 2024-2026 yang dijabarkan dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026. Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Kecamatan Gunung Kaler Tahun 2024 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017.

Dalam konteks perencanaan pembangunan, Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan, melayani/memenuhi kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, dalam era globalisasi, Kecamatan Gunung Kaler dituntut untuk siap dan sanggup

membuat/menyusun suatu perencanaan yang baik, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Untuk lebih jelasnya mengenai review rancangan RKPD Perubahan Tahun 2025 dapat dilihat Tabel 4 (T-C.31) berikut ini:

Table 4 (T-C.31)
Review terhadap Rancangan RKPD Perubahan tahun 2025
Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang

NO	RANCANGAN RKPD 2025					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	KECAMATAN GUNUNG KALER				**14.805.930.844**	**KECAMATAN GUNUNG KALER**				**20.103.762.104**	
	UNSUR KEWILAYAHAN				**14.805.930.844**	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**20.103.762.104**	
	KECAMATAN				**14.805.930.844**	**KECAMATAN**				**20.103.762.104**	
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		***Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan***	**100 Persen**	**6.435.648.443**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		***Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan***	**100 Persen**	**7.504.420.028**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		*Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	6 dokumen	166.724.300	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		*Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	5 dokumen	127.053.070	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	5 Dokumen	83.321.400	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	4 Dokumen	63.396.490	Efisiensi anggaran
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	1 Laporan	83.402.900	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	1 Laporan	63.656.580	Efisiensi anggaran
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		*Jumlah laporan keuangan*	2 dokumen	4.759.261.811	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		*Jumlah laporan keuangan*	2 dokumen	5.049.395.157	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	19 Orang/b ulan	4.675.931.861	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	19 Orang/b ulan	4.986.934.817	Kenaikan gaji berkala dan pajak
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD*	1 Laporan	83.329.950	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD*	1 Laporan	62.460.340	Efisiensi anggaran
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		*Jumlah pegawai yang difasilitas*	19 orang	161.105.918	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		*Jumlah pegawai yang difasilitas*	19 orang	120.364.000	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*	19 Paket	60.999.918	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*	19 Paket	60.862.000	Efisiensi anggaran
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		*Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai*	19 Dokumen	100.106.000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		*Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai*	11 Dokumen	59.502.000	Efisiensi anggaran
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		*Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah*	7 jenis	451.777.770	Administrasi Umum Perangkat Daerah		*Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah*	7 jenis	600.070.700	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	5 Paket	18.045.100	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	5 Paket	18.691.800	Belanja alat service listrik
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	10 Paket	199.975.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	18 Paket	357.234.900	Pengadaan gerobak motor untuk 9 desa sebanyak 4 unit

NO	RANCANGAN RKPD 2025					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*	5 Paket	51.770.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*	6 Paket	65.711.000	UPS power supply
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	2 Paket	50.016.070	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	3 Paket	67.866.000	Tinta dan Toner Pinter
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	2 Paket	24.971.600	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	2 Paket	24.980.000	Penggandaan
	Fasilitasi Kunjungan Tamu		*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	4 Laporan	57.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu		*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	4 Laporan	54.367.000	Efisiensi anggaran
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	12 Laporan	50.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	3 Laporan	11.220.000	Efisiensi anggaran
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		*Tersedianya Jasa Penunjang*	3 jenis	557.156.444	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		*Tersedianya Jasa Penunjang*	3 jenis	1.215.643.866	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	12 Laporan	15.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	1 Laporan	3.704.590	Efisiensi anggaran
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	12 Laporan	144.000.444	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	12 Laporan	148.489.708	Penambahan daya
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	12 Laporan	398.156.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	12 Laporan	1.063.449.568	THR dan GAJI 13 NON ASN
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		*Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	4 jenis	339.622.200	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		*Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	4 jenis	391.893.235	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	5 Unit	202.672.200	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	5 Unit	231.702.460	BBM Kendaraan operasional
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	30 Unit	27.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	36 Unit	30.600.000	Laptop, AC, Printer
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	2 Unit	109.950.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	2 Unit	129.590.775	Penambahan anggaran pada Pemeliharaan Taman Kantor Kecamatan
2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		***Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara***	**100 Persen**	**5.553.855.576**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		***Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara***	**100 Persen**	**9.672.560.511**	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		*Pemenuhan sarana dan prasarana Paten di Kecamatan*	3 jenis	199.172.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		*Pemenuhan sarana dan prasarana Paten di Kecamatan*	2 jenis	23.882.000	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		*Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	2 Laporan	199.172.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		*Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	1 Laporan	23.882.000	Efisiensi anggaran
	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum		*Jumlah infrastruktur yang dipelihara*	100 titik	5.354.683.576	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum		*Jumlah infrastruktur yang dipelihara*	119 titik	9.648.678.511	
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau		*Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan*	5 Dokumen	5.354.683.576	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah		*Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan*	9 Dokumen	9.648.678.511	Rehabilitasi Stadion Mini,

NO	RANCANGAN RKPD 2025					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum		*Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum*			dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum		*Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum*			dan Aspirasi dari DPRD
3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		***Persentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan***	**100 Persen**	**2.015.977.775**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		***Persentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan***	**100 Persen**	**2.286.672.035**	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		*Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan/pemberdayaan*	13 kelompok	2.015.977.775	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		*Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan/pemberdayaan*	14 kelompok	2.286.672.035	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa*	10 Lembaga K emasyarak atan	123.600.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa*	10 Lembaga K emasyarak atan	117.488.750	Efisiensi anggaran
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		*Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	6 Laporan	1.892.377.775	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		*Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	7 Laporan	2.169.183.285	Inovasi pengolahan buah kemiri dan tempe semangit
4	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		**Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti**	**100 Persen**	**106.600.000**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		***75 Persen***	**75 Persen**	**80.415.880**	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		*Terkoordinasinya kegiatan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan*	4 dokumen	106.600.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		*Terkoordinasinya kegiatan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan*	3 dokumen	80.415.880	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		*Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan*	4 Laporan	106.600.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		*Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan*	3 Laporan	80.415.880	Efisiensi anggaran
5	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		***Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti***	**100 Persen**	**493.763.200**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		***Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti***	**84 Persen**	**414.721.290**	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		*Terselenggaranya urusan pemerintahan umum sesuai dengan penugasan Kepala Daerah*	9 dokumen	493.763.200	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		*Terselenggaranya urusan pemerintahan umum sesuai dengan penugasan Kepala Daerah*	8 dokumen	414.721.290	
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, PelaksanaanUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia*	50 Orang	224.063.200	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, PelaksanaanUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia*	52 Orang	231.047.520	Fasilitasi Program Generasi Unggul melalui Pramuka Garuda
	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas		*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan*	50 Orang	128.300.000	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas		*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan*	30 Orang	78.885.650	Efisiensi anggaran

NO	RANCANGAN RKPD 2025					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional		*Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional*			Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional		*Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional*			
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		*Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan*	1 Dokumen	141.400.000	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		*Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan*	1 Dokumen	104.788.120	Efisiensi anggaran
6	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**		***Persentase tertib administrasi pemerintahan desa***	**100 Persen**	**200.085.850**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**		***Persentase tertib administrasi pemerintahan desa***	**73 Persen**	**144.972.360**	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		*Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa*	9 dokumen	200.085.850	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		*Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa*	7 dokumen	144.972.360	
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		*Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa*	9 Dokumen	200.085.850	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		*Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa*	7 Dokumen	144.972.360	Efisiensi anggaran

Pada tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Tangerang melakukan pemutakhiran indikator dan satuan yang mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sehingga terjadi ketidaksesuaian antara Renstra 2024-2026 dengan RKPD Perubahan 2025. Berikut daftar sub kegiatan yang mengalami perubahan indikator dan satuan di Kecamatan Gunung Kaler:

NO	KODE	SUB KEGIATAN	RENSTRA 2024-2026		RENJA PERUBAHAN 2025	
			INDIKATOR	SATUAN	INDIKATOR	SATUAN
1	2	3	4	5	6	7
1	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	orang	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	Laporan
2	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	paket	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	Laporan
3	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	orang	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	Laporan
4	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di	laporan	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	Laporan
5	7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	*Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum*	Dokumen
6	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	lembaga	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa*	Lembaga Kemasyarakatan
7	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di	laporan	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	Laporan

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan Program dan Kegiatan Kecamatan Gunung Kaler pada tahun 2025 dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum dan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati dalam rangka penguatan otonomi daerah diarahkan pada:

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang menjadi kewenangan kecamatan dan peningkatan kualitas aparaturnya;
2. Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan desa;
3. Upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, dan koordinasi dengan Muspika yang ada di Kecamatan Gunung Kaler.
4. Mendorong kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan

retribusi;

5. Peningkatan semua infrastruktur yang ada di desa-desa se Kecamatan Gunung Kaler. Baik sarana jalan, irigasi dan saluran-saluran air serta sarana pendidikan serta kesehatan.

Telaah usulan Program dan Kegiatan masyarakat ini didasari oleh pemikiran masyarakat melalui musrenbang yang telah dilakukan dan perlunya peningkatan peran serta masyarakat dalam melaksanakan musyawarah pembangunan baik yang dilaksanakan di desa maupun di Kecamatan:

Tabel 5 (T-C.32)
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2025
Kabupaten Tangerang

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Gunung Kaler

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	Pembangunan Gedung/Bangunan Pemerintah Daerah	Kantor Kecamatan Gunung Kaler, Desa Gunung Kaler	Optimalisasi Akses Pemuda dan Pelaku Usaha dalam Pengembangan Kewirausahaan (Gedung Worshop Kewirausahaan)	1 Paket	
2	Pembangunan Gedung/Bangunan Pemerintah Daerah	Kantor Kecamatan Gunung Kaler, Desa Gunung Kaler	Meningkatkan Tertib Adminstrasi Arsip Perangkat Daerah (Gedung Arsip)	1 Paket	
3	Pembangunan Gedung/Bangunan Pemerintah Daerah	Kantor Kecamatan Gunung Kaler, Desa Gunung Kaler	Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Pertanian (Gedung Balai Benih Kecamatan)	1 Paket	
4	Pembangunan Gedung/Bangunan Pemerintah Daerah	Kantor Kecamatan Gunung Kaler, Desa Gunung Kaler	Meningkatkan Minat Baca Masyarakat dan Optimalisasi Kunjungan Perpustakaan (Gedung Perpustakaan)	1 Paket	
5	Pembangunan Gedung/Bangunan Pemerintah Daerah	Kantor Kecamatan Gunung Kaler, Desa Gunung Kaler	Optimalisasi Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar	1 Paket	
6	Rehabilitasi Pembangunan Gedung Puskesmas/Pustu	Puskesmas Gunung Kaler, Desa Gunung Kaler	Optimalisasi Pelayanan Kesehatan Masyarakat (Penataan Halaman Puskesmas)	30 M X 20 M	
7	Pembangunan Jembatan	Kp. Sintog, Desa Cipaeh	Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Pertanian	32 M X 2 M	
8	Pembangunan Jembatan	Kp. Karang Jetak RT.009 RW.003, Desa Kandawati	Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Pertanian	15 M X 3 M	
9	Pengembangan Desa Inovatif (Wisata, Sentra Produksi, Sentra Kuliner, Edukasi, dll) Wilayah Kecamatan Gunung Kaler	Desa Kandawati	Pengembangan Desa Wisata Religi	1 Paket	

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
10	Pembangunan Jaringan Irigasi	Desa Sidoko	Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Pertanian	1500 M	
11	Pengadaan Lahan Aset Pemda	Kp. Gunung Kidul RT.008 RW.002, Desa Gunung Kaler	Terwujudnya Kondisi TPU Pemerintah Yang Ideal	2000 M2	
12	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Beserta Perabotnya	SDN Gunung Kaler 1, Desa Gunung Kaler	Optimalisasi Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan	2 Lokal	
13	Peningkatan Jaringan Irigasi	Kp. Cibetok RT.005 RW.003, Desa Cibetok	Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Pertanian	200 M	
14	Pembangunan Jalan	Jl. Poros Desa Cibetok - Rancagede, Kp. Gebang RT.002 RW.001, Desa Cibetok	Optimalisasi Akses Perekonomian Masyarakat	200 M X 4 M	
15	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Beserta Perabotnya	SDN Cibetok 2, Desa Cibetok	Optimalisasi Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan	6 Lokal	
16	Pembangunan Jembatan	Kp. Cipaeh RT.013 RW.004, Desa Gunung Kaler	Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Pertanian	5 M X 30 M	
17	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni	Desa Kedung	Optimalisasi Penanganan Lingkungan Permukiman Kumuh	10 Unit	
18	Normalisasi Daerah Irigasi (DI) Kecil dan Saluran Pembuang	Kp. Kedung I RT.007 RW.002, Desa Kedung	Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Pertanian	1000 M	
19	Pembangunan Jalan	Kp. Kedung II RT.006 RW.002, Desa Kedung	Optimalisasi Akses dan Kapasitas Jalan Umum	400 M X 4 M X 0,2 M	
20	Pembangunan Jembatan	Kp. Pasir Semut RT.014 RW.004, Desa Rancagede	Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Pertanian	4 M X 3 M	
21	Pembangunan Jalan	Kp. Pasir Semut RT.014 RW.004, Desa Rancagede	Optimalisasi Akses dan Kapasitas Jalan Umum	200 M X 3 M	
22	Pembangunan Jalan	Kp. Kebon RT.013 RW.003, Desa Tamiang	Optimalisasi Akses dan Kapasitas Jalan Umum	200 M X 3 M	
23	Pembangunan Jalan	Jl. Lumalang - Sidoko, Desa Cipaeh	Optimalisasi Akses dan Kapasitas Jalan Umum	500 M X 4 M	
24	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Beserta Perabotnya	SDN Onyam 2, Desa Onyam	Optimalisasi Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan	6 Lokal	
25	Pembangunan Jalan	Kp. Kandang - Kp. Cuwut, Desa	Optimalisasi Akses dan Kapasitas Jalan Umum	500 M X 3 M	

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
		Tamiang			
26	Pembangunan sarana jaringan sanitasi dasar perumahan bagi masyarakat miskin	Desa Kedung	Optimalisasi Penanganan Lingkungan Permukiman Kumuh	50 Unit	
27	Penataan Halaman Sekolah	SDN Kedung 2, Desa Kedung	Optimalisasi Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan	30 M X 25 M	
28	Rehabilitasi Ruang Kelas Beserta Perabotnya	SDN Kedung 1, Desa Kedung	Optimalisasi Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan	3 Lokal	
29	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Beserta Perabotnya	SDN Kedung 3, Desa Kedung	Optimalisasi Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan	6 Lokal	
30	Pembangunan Jembatan	Kp. Carenang RT. 010 RW.003, Desa Gunung Kaler	Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Pertanian	2 M X 6 M	
31	Pengadaan Lahan Aset Pemda	SDN Gunung Kaler 1, Kp. Gunung Kaler RT.001 RW.001, Desa Gunung Kaler	Optimalisasi Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan	1800 M2	
32	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni	Desa Sidoko	Optimalisasi Penanganan Lingkungan Permukiman Kumuh	10 Unit	
33	Pembangunan Jalan	KP. Mekar Jaya RT.008 RW.004, Desa Cibetok	Optimalisasi Akses dan Kapasitas Jalan Umum	200 M X 4 M	
34	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Beserta Perabotnya	SDN Gunung Kaler 2, Desa Gunung Kaler	Optimalisasi Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan	4 Lokal	
35	Penataan Halaman Sekolah	SMPN 1 Gunung Kaler, Desa Kedung	Optimalisasi Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan	30 M X 25 M	
36	Pembangunan Jalan	Jl. Rancagede - Cipaeh, Desa Rancagede	Optimalisasi Akses dan Kapasitas Jalan Umum	200 M X 3 M	
37	Pembangunan Jalan	Jl. Pasar Bolang - Cibetok, Desa Rancagede	Optimalisasi Akses dan Kapasitas Jalan Umum	500 M X 3 M	
38	Pembangunan Jalan	Kp. Bengkanang RT.001 RW.002, Desa Onyam	Optimalisasi Akses dan Kapasitas Jalan Umum	500 M X 3 M	
39	Pembangunan Jalan	KP. Carenang RT.010 RW.003, Desa Onyam	Optimalisasi Akses dan Kapasitas Jalan Umum	300 M X 3 M	
40	Penataan Halaman Sekolah	SDN Sidoko 1, Kp. Sidoko RT.009 RW.003, Desa Sidoko	Optimalisasi Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan	30 M X 25 M	
41	Rehabilitasi	Kp. Kulung	Optimalisasi Pelayanan	500 M2	

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	Pembangunan Gedung Puskesmas/Pustu	Baya RT.008 RW.002, Desa Sidoko	Kesehatan Masyarakat		
42	Pembangunan Jembatan	Kp. Gebang RT.012 RW.003, Desa Kandawati	Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Pertanian	10 M X 3 M	
43	Pembangunan Jalan	Kp. Karang Jetak RT.009 RW.003, Desa Kandawati	Optimalisasi Akses dan Kapasitas Jalan Umum	100 M X 4 M	
44	Normalisasi Daerah Irigasi (DI) Kecil dan Saluran Pembuang	Kp. Tinggulun - Kp. Gabus Cibetok, Desa Tamiang	Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Pertanian	1000 M2	
45	Pembangunan Jembatan	Kp. Tinggulun RT.001 RW.001, Desa Tamiang	Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Pertanian	30 M X 2 M	
46	Pembangunan Jaringan Pembuangan limbah rumah tangga di kawasan permukiman kumuh	Kp. Genggong, Desa Tamiang	Optimalisasi Penanganan Lingkungan Permukiman Kumuh (MCK)	1 Unit	
47	Pembangunan Jembatan	Kp. Mendaya RT.009 RW.003, Desa Onyam	Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Pertanian	35 M X 2 M	
48	Bantuan Hibah Pengembangan Peternak	Kelompok Peternak, Desa Onyam	Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Peternakan	2000 Ekor	
49	Pembangunan Jaringan Irigasi	Kp. Serdang, Desa Cipaeh	Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Pertanian	500 M	
50	Pembangunan Jalan	Kp. Sintog, Desa Cipaeh	Optimalisasi Akses dan Kapasitas Jalan Umum	400 M X 3 M	

2.6 Evaluasi Risk Register Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025

Evaluasi terhadap risk register bertujuan untuk memastikan bahwa implementasi manajemen risiko berjalan sesuai dengan perencanaan serta sebagai dasar untuk melakukan perbaikan secara berkala terhadap proses manajemen risiko melalui pemeriksaan terhadap proses bisnis yang berjalan. Monitoring dan evaluasi pengelolaan risiko pada Kecamatan Gunung Kaler dilakukan setiap triwulan sesuai dengan yang diamanatkan di dalam Peraturan Bupati Tangerang Nomor 66 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Manajemen Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang. Berikut pemantauan selama triwulan I tahun 2025:

PENCATATAN KEJADIAN RISIKO (RISK EVENT) DAN RTP
TRIWULAN I TAHUN 2025

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Gunung Kaler

No	"Risiko" yang teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal Terjadi	Sebab	Dampak					
I	**Risiko Strategis Kecamatan Gunung Kaler**									
1	metode survei kepuasan masyarakat yang tidak mudah dipahami masyarakat	RSO.25.12.99.01	Tidak terjadi	Tidak terjadi	Tidak terjadi		Monitoring dan evaluasi Pencapaian target setiap triwulan	Triwulan 3		
2	Kualitas dokumen laporan dan pendukung yang belum terpenuhi	RSO.25.33.99.03	Tidak terjadi	Tidak terjadi	Tidak terjadi		Mengadakan rapat laporan hasil evaluasi LKIP tahun 2024	Triwulan 2		
II	**Risiko Operasional Kecamatan Gunung Kaler**									
1	Petugas memiliki tugas lain di luar tanggung jawab utama	ROO.25.38.99.02	Tidak terjadi	Tidak terjadi	Tidak terjadi		Teguran tertulis	Triwulan 3		
2	adanya kelompok masyarakat yang belum terfasilitasi	ROO.25.38.99.03	Tidak terjadi	Tidak terjadi	Tidak terjadi		melakukan monitoring dan evaluasi pencapaian target setiap triwulan	Triwulan 3		

No	"Risiko" yang teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal Terjadi	Sebab	Dampak					
3	dokumen perencanaan yang belum terintegrasi dengan maksimal	ROO.25.36.99.04	Tidak terjadi	Tidak terjadi	Tidak terjadi		mengakomodir usulan perencanaan untuk diakomodir pada APBD Perubahan	Triwulan 2		
4	Capaian realisasi gaji dan tunjangan yang tidak optimal	ROO.25.37.99.05	Tidak terjadi	Tidak terjadi	Tidak terjadi		Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap realisasi gaji dan tunjangan secara berkala	Triwulan 2		

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN GUNUNG KALER

Dalam pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh OPD, diperlukan suatu perencanaan yang akan dijalankan di tahun mendatang. Perencanaan ini berisi program kegiatan menjadi tanggung jawab masing-masing OPD. Untuk OPD Kecamatan Gunung Kaler akan melaksanakan Program dan kegiatan sebagaimana pada tabel berikut ini :

Tabel 6
Rencana Kerja Dan Pendanaan Perubahan Kecamatan Gunung Kaler Tahun 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		KECAMATAN GUNUNG KALER				**14.805.930.844**	**18.730.135.049**	**20.103.762.104**	**5.297.831.260**		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**14.805.930.844**	**18.730.135.049**	**20.103.762.104**	**5.297.831.260**		
	7,01	**KECAMATAN**				**14.805.930.844**	**18.730.135.049**	**20.103.762.104**	**5.297.831.260**		
1	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan**	**100 Persen**	**100 Persen**	**6.435.648.443**	**7.221.273.523**	**7.504.420.028**	**1.068.771.585**		
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	6 dokumen	5 dokumen	166.724.300	169.403.350	127.053.070	- 39.671.230		KECAMATAN GUNUNG KALER
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	5 Dokumen	4 Dokumen	83.321.400	84.505.770	63.396.490	- 19.924.910	Kab. Tangerang, Gunung Kaler, Semua Kel/Desa	KECAMATAN GUNUNG KALER
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	1 Laporan	1 Laporan	83.402.900	84.897.580	63.656.580	- 19.746.320	Kab. Tangerang, Gunung Kaler, Semua Kel/Desa	KECAMATAN GUNUNG KALER
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan	2 dokumen	2 dokumen	4.759.261.811	4.954.638.626	5.049.395.157	290.133.346		KECAMATAN GUNUNG KALER
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	19 Orang/bulan	19 Orang/bulan	4.675.931.861	4.871.309.306	4.986.934.817	311.002.956	Kab. Tangerang, Gunung Kaler, Semua Kel/Desa	KECAMATAN GUNUNG KALER
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD*	1 Laporan	1 Laporan	83.329.950	83.329.320	62.460.340	- 20.869.610	Kab. Tangerang, Gunung Kaler, Semua Kel/Desa	KECAMATAN GUNUNG KALER
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah pegawai yang difasilitas*	19 orang	19 orang	161.105.918	157.414.000	120.364.000	- 40.741.918		KECAMATAN GUNUNG KALER
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*	19 Paket	19 Paket	60.999.918	60.862.000	60.862.000	- 137.918	Kab. Tangerang, Gunung Kaler, Semua Kel/Desa	KECAMATAN GUNUNG KALER
	7.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	*Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai*	19 Dokumen	11 Dokumen	100.106.000	96.552.000	59.502.000	- 40.604.000	Kab. Tangerang, Gunung Kaler, Semua Kel/Desa	KECAMATAN GUNUNG KALER
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah*	7 jenis	7 jenis	451.777.770	422.503.700	600.070.700	148.292.930		KECAMATAN GUNUNG KALER
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	5 Paket	5 Paket	18.045.100	18.691.800	18.691.800	646.700	Kab. Tangerang, Gunung	KECAMATAN GUNUNG KALER

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								Kaler, Semua Kel/Desa	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	10 Paket	18 Paket	199.975.000	136.258.900	357.234.900	157.259.900	Kab. Tangerang, Gunung Kaler, Semua Kel/Desa	KECAMATAN GUNUNG KALER
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*	5 Paket	6 Paket	51.770.000	65.711.000	65.711.000	13.941.000	Kab. Tangerang, Gunung Kaler, Semua Kel/Desa	KECAMATAN GUNUNG KALER
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	2 Paket	3 Paket	50.016.070	67.866.000	67.866.000	17.849.930	Kab. Tangerang, Gunung Kaler, Semua Kel/Desa	KECAMATAN GUNUNG KALER
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	2 Paket	2 Paket	24.971.600	24.980.000	24.980.000	8.400	Kab. Tangerang, Gunung Kaler, Semua Kel/Desa	KECAMATAN GUNUNG KALER
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	4 Laporan	4 Laporan	57.000.000	56.970.000	54.367.000	- 2.633.000	Kab. Tangerang, Gunung Kaler, Semua Kel/Desa	KECAMATAN GUNUNG KALER
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	12 Laporan	3 Laporan	50.000.000	52.026.000	11.220.000	- 38.780.000	Kab. Tangerang, Gunung Kaler, Semua Kel/Desa	KECAMATAN GUNUNG KALER
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang	3 jenis	3 jenis	557.156.444	1.125.420.612	1.215.643.866	658.487.422		KECAMATAN GUNUNG KALER
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	12 Laporan	1 Laporan	15.000.000	4.682.710	3.704.590	- 11.295.410	Kab. Tangerang, Gunung Kaler, Semua Kel/Desa	KECAMATAN GUNUNG KALER
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	12 Laporan	12 Laporan	144.000.444	143.688.334	148.489.708	4.489.264	Kab. Tangerang, Gunung Kaler, Semua Kel/Desa	KECAMATAN GUNUNG KALER
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	12 Laporan	12 Laporan	398.156.000	977.049.568	1.063.449.568	665.293.568	Kab. Tangerang, Gunung Kaler, Semua Kel/Desa	KECAMATAN GUNUNG KALER
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	4 jenis	4 jenis	339.622.200	391.893.235	391.893.235	52.271.035		KECAMATAN GUNUNG KALER
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	5 Unit	5 Unit	202.672.200	231.702.460	231.702.460	29.030.260	Kab. Tangerang, Gunung Kaler, Semua Kel/Desa	KECAMATAN GUNUNG KALER
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	30 Unit	36 Unit	27.000.000	30.600.000	30.600.000	3.600.000	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan,	KECAMATAN GUNUNG KALER

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										Semua Kel/Desa	
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	2 Unit	2 Unit	109.950.000	129.590.775	129.590.775	19.640.775	Kab. Tangerang, Gunung Kaler, Semua Kel/Desa	KECAMATAN GUNUNG KALER
2	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar**	**100 Persen**	**100 Persen**	**5.553.855.576**	**8.120.119.031**	**9.672.560.511**	**4.118.704.935**		
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Pemenuhan sarana dan prasarana Paten di Kecamatan*	3 jenis	2 jenis	199.172.000	31.172.000	23.882.000	- 175.290.000		KECAMATAN GUNUNG KALER
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	2 Laporan	1 Laporan	199.172.000	31.172.000	23.882.000	- 175.290.000	Kab. Tangerang, Gunung Kaler, Semua Kel/Desa	KECAMATAN GUNUNG KALER
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	*Jumlah infrastruktur yang dipelihara*	100 titik	119 titik	5.354.683.576	8.088.947.031	9.648.678.511	4.293.994.935		KECAMATAN GUNUNG KALER
	7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	*Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum*	5 Dokumen	9 Dokumen	5.354.683.576	8.088.947.031	9.648.678.511	4.293.994.935	Kab. Tangerang, Gunung Kaler, Semua Kel/Desa	KECAMATAN GUNUNG KALER
3	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan**	**100 Persen**	**100 Persen**	**2.015.977.775**	**2.530.696.225**	**2.286.672.035**	**270.694.260**		
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan/pemberdayaan*	13 kelompok	14 kelompok	2.015.977.775	2.530.696.225	2.286.672.035	270.694.260		KECAMATAN GUNUNG KALER
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa*	10 Lembaga Kemasyarakatan	10 Lembaga Kemasyarakatan	123.600.000	117.488.750	117.488.750	- 6.111.250	Kab. Tangerang, Gunung Kaler, Semua Kel/Desa	KECAMATAN GUNUNG KALER
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	6 Laporan	7 Laporan	1.892.377.775	2.413.207.475	2.169.183.285	276.805.510	Kab. Tangerang, Gunung Kaler, Semua Kel/Desa	KECAMATAN GUNUNG KALER
4	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti**	**100 Persen**	**75 Persen**	**106.600.000**	**106.599.880**	**80.415.880**	**- 26.184.120**		
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Terkoordinasinya kegiatan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan*	4 dokumen	3 dokumen	106.600.000	106.599.880	80.415.880	- 26.184.120		KECAMATAN GUNUNG KALER
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan*	4 Laporan	3 Laporan	106.600.000	106.599.880	80.415.880	- 26.184.120	Kab. Tangerang, Gunung Kaler, Semua Kel/Desa	KECAMATAN GUNUNG KALER
5	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN**	**Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti**	**100 Persen**	**84 Persen**	**493.763.200**	**551.354.780**	**414.721.290**	**- 79.041.910**		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		URUSAN PEMERINTAHAN UMUM									
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Terselenggaranya urusan pemerintahan umum sesuai dengan penugasan Kepala Daerah*	9 dokumen	8 dokumen	493.763.200	551.354.780	414.721.290	- 79.041.910		KECAMATAN GUNUNG KALER
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia*	50 Orang	52 Orang	224.063.200	281.789.660	231.047.520	6.984.320	Kab. Tangerang, Gunung Kaler, Semua Kel/Desa	KECAMATAN GUNUNG KALER
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional*	50 Orang	30 Orang	128.300.000	128.215.650	78.885.650	- 49.414.350	Kab. Tangerang, Gunung Kaler, Semua Kel/Desa	KECAMATAN GUNUNG KALER
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	*Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan*	1 Dokumen	1 Dokumen	141.400.000	141.349.470	104.788.120	- 36.611.880	Kab. Tangerang, Gunung Kaler, Semua Kel/Desa	KECAMATAN GUNUNG KALER
6	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase tertib administrasi pemerintahan desa**	**100 Persen**	**73 Persen**	**200.085.850**	**200.091.610**	**144.972.360**	**- 55.113.490**		
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa*	9 dokumen	7 dokumen	200.085.850	200.091.610	144.972.360	- 55.113.490		KECAMATAN GUNUNG KALER
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	*Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa*	9 Dokumen	7 Dokumen	200.085.850	200.091.610	144.972.360	- 55.113.490	Kab. Tangerang, Gunung Kaler, Semua Kel/Desa	KECAMATAN GUNUNG KALER
	J U M L A H					**14.805.930.844**	**18.730.135.049**	**20.103.762.104**	**5.297.831.260**		

Berdasarkan Tabel 4 (TC.31) dan Tabel 6 Rencana Kerja Dan Pendanaan Perubahan Kecamatan Gunung Kaler Tahun 2025, terdapat ketidaksesuaian Target Kegiatan antara Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2025 dengan Renstra 2024-2026 dikarenakan adanya:

1. Efisiensi anggaran berdasarkan INPRES Nomor 1 Tahun 2025 yaitu pada sub kegiatan:
    - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
    - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
    - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
    - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
    - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
    - Fasilitasi Kunjungan Tamu
    - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
    - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
    - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
    - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
    - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
    - Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
    - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
    - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa

2. Penambahan usulan kegiatan yang mendesak yaitu pada sub kegiatan :
    - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor berupa Pengadaan gerobak motor untuk 9 desa sebanyak 4 unit
    - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga berupa pengadaan UPS power supply
    - Penyediaan Bahan Logistik Kantor berupa penambahan Tinta dan Toner Pinter
    - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya berupa penambahan pemeliharaan Laptop, AC, Printer masing-masing 2 unit
    - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum berupa penambahan Rehabilitasi Stadion Mini, dan beberapa Aspirasi dari DPRD
    - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan berupa fasilitasi Inovasi pengolahan buah kemiri dan tempe semangit
    - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berupa Fasilitasi Program Generasi Unggul melalui Pramuka Garuda

Pada Renja Perubahan Kecamatan Gunung Kaler Tahun 2025 selain ketidaksesuaian Target Kegiatan antara Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2025 dengan Renstra 2024-2026 terdapat adanya penambahan Pagu Anggaran tanpa merubah target kinerja, yaitu pada Sub Kegiatan:

1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dikarenakan adanya kenaikan gaji berkala dan pajak
2 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dikarenakan adanya penambahan belanja alat service listrik
3 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dikarenakan adanya penambahan belanja Penggandaan
4 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dikaernakan adanya Penambahan daya listrik
5 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dikaernakan adanya penambahan anggaran untuk gaji 13 dan THR tenaga non ASN
6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dikarenakan adanya penambahan pagu pada belanja BBM Kendaraan operasional
7 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dikaernakan adanya penambahan anggaran pada Pemeliharaan Taman Kantor Kecamatan.

BAB IV
PENUTUP

Renja Perubahan Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang Tahun 2025 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

4.1 Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Renja Perubahan Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang Tahun 2025 antara lain :

1. Perumusan program dan kegiatan beserta indikatornya pada Renja Perubahan Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tangerang;
2. Penyusunan Renja Perubahan Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang 2025 merupakan pedoman dalam melakukan kegiatan kecamatan pada tahun 2025 setelah dilakukan evaluasi pada tahun berjalan sampai dengan Triwulan ke 2 tahun 2025. Selain itu terdapat penyesuaian penambahan dan pengurangan anggaran/kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Kecamatan Gunung Kaler;
3. Anggaran pada Renja Perubahan Kecamatan Gunung Kaler hamper secara keseluruhan kegiatan dan sub kegiatan mengalami perubahan dari Renja Murni 2025 dikarenakan adanya penyesuaian kebutuhan pada Kecamatan Gunung Kaler;
4. Penyusunan Renja Perubahan Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang ini juga berpedoman pada RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2024, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

4.2 Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Renja Perubahan Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Seluruh Seksi dan Sub Bagian berkewajiban untuk melaksanakan program-program yang terdapat pada dokumen Renja Perubahan Kecamatan Gunung Kaler dengan berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Tangerang, serta masyarakat maupun stake holder;
2. Dalam rangka menjamin tercapainya target indikator kinerja daerah dalam Renja Perubahan Kecamatan Gunung kaler, diperlukan langkah-langkah optimalisasi pelaksanaan kegiatan yang dipedomani dan dijabarkan dalam penyusunan rancangan program kerja.

4.3 Rencana Tindak Lanjut

Rencana Tindak Lanjut dari penyusunan dokumen Renja Perubahan Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang ini adalah melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan serta melaksanakan pengendalian setiap triwulan baik untuk realisasi anggaran maupun atas kinerja yang telah ditetapkan. Keberhasilan pelaksanaan Renja Perubahan ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan stakeholder

pembangunan di Kabupaten Tangerang.

Demikian dengan tersusunnya Renja Perubahan Kecamatan Gunung Kaler ini semoga dapat menjadi pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan di Tahun 2025 Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang agar dapat terwujud konsistensi antara perencanaan penganggaran serta pelaksanaan program dan kegiatan di Kecamatan Gunung Kaler, dan tersusunnya Renja Perubahan Kecamatan Gunung Kaler Tahun 2025 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian visi Pemerintah Kabupaten Tangerang.

61. Rumah Sakit Umum Daerah Tangerang

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perubahan Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 Semester. Fungsi Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dalam membangun daerah sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Renja Perubahan Perangkat Daerah memuat antara lain program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pagu indikatif serta prakiraan maju.

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2025 secara garis besar memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Sebagai sebuah dokumen resmi, Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2025 akan menjadi dasar dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Tahun Anggaran 2025, serta digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA-P) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P). Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa proses penyusunan Rencana Perangkat Daerah terdiri dari beberapa tahapan yaitu tahap persiapan penyusunan, penyusunan rencana kerja, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah, perumusan rencana kerja dan tahap penetapan renja perangkat daerah.

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang merupakan

salah satu perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan Bidang Kesehatan yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan bidang kesehatan di wilayah Kabupaten Tangerang.

Rencana Kerja Perubahan Organisasi Perangkat Daerah (Renja-P OPD) disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta mengacu pada Renstra-OPD yang memuat kebijakan, Program, dan Kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dalam jangka waktu Semester I Tahun 2025. Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perubahan Organisasi Perangkat Daerah (Renja-P OPD) adalah Dokumen Perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode Semester I Tahun 2025.

Sebagai Dokumen Rencana Tahunan Organisasi Perangkat Daerah, Rencana Kerja Perubahan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

a. Rencana Kerja OPD merupakan dokumen yang secara substansial mewujudkan Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah atau Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tangerang Tahun 2024 - 2026 sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD).

b. Rencana Kerja Perubahan Merupakan acuan OPD sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program kegiatan kedalam KUA, PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA-P) Tahun 2025.

c. Rencana Kerja Perubahan OPD merupakan salah satu instrument untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Organisasi Perangkat Daerah.

d.

Dalam rangka upaya mencapai target sasaran pembangunan yang telah diamanatkan didalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah atau Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tangerang Tahun 2024 - 2026, tentunya diperlukan perencanaan-perencanaan yang matang, terpadu dan terintegrasi agar proses pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditentukan dapat berjalan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran. Sehubungan dengan hal tersebut, maka disusun Rencana Kerja Perubahan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2025 guna mencapai sasaran yang telah ditentukan didalam RPJMD Kabupaten Tangerang dan sebagaimana telah dijabarkan kedalam Renstra Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang.

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 ini akan dijabarkan setiap pelaksanaan program dan kegiatan tersebut, yang sistem penyusunan anggarannya merupakan perpaduan antara RKA-P (Rencana Kegiatan

dan Anggaran Perubahan) dan RBA-P (Rencana Bisnis Anggaran Perubahan).

1.2 Landasan Hukum

Rencana kerja Perubahan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2025 dengan dasar hukum sebagai berikut :

1. Pasal I18 Ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
7. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
8. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembar Negara Nomor 5234);
9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6323);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perubahan Pemerintah nomor 18 tahun 2016 tenyang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 187);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomr 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata kerja perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah serta tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025;
23. Peraturan Gubernur Banten Nomor 33 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2023-2026;
24. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2005-2025;
25. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 39 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tangerang Tahun 2024 - 2026;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Perubahan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2025 adalah :

1. Untuk memberikan kemudahan dan kejelasan terhadap capaian-capaian yang telah ditetapkan sebagai pedoman dalam menjalankan kegiatan pada Tahun 2025.

2. Memberikan arah dan pedoman bagi aparatur Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang dalam melaksanakan tugasnya, sehingga sasaran dan target capaian pembangunan yang dilaksanakan di dalam program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu Semester I Tahun 2025 dapat berjalan sesuai dengan kebijakan
3. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (*Stakeholders*) tentang Rencana Kerja pada tahun berjalan.

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Perubahan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang adalah :

1. Merumuskan program, kegiatan dan pendanaan untuk Semester I Tahun 2025 yang akan dilaksanakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang.
2. Mengoptimalkan peran dan fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang di dalam pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Tangerang di Bidang Kesehatan.
3. Mempermudah pengendalian, monitoring, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan rencana kegiatan dalam kurun waktu Semester I Tahun 2025.

1.**4 Sistematika Penulisan**

Dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2025 disusun berdasarkan sistematika penulisan sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN
   - Latar Belakang
   - Landasan Hukum
   - Maksud dan Tujuan
   - Sistematika Penulisan

II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KINERJA SEMSTER I TAHUN 2025
   - Evaluasi Pelaksanaan Renja Semester I Tahun 2025 Perangkat Daerah Tahun ini dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.
   - Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
   - Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah.
   - Review terhadap Rancangan Awal RKPD

III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
   - Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
   - Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
   - Program dan Kegiatan

IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

V. PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KINERJA SEMESTER I TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Semester I Tahun 2025 Perangkat Daerah Tahun ini dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Pencapaiaan Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang pada Semester I Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

a. Kinerja Pelayanan BLUD

Realisasi kinerja pelayanan kesehatan pada Semester I Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel Pengukuran Pencapaian Sasaran Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang sebagai berikut :

Tabel 2.1
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota

- Instalasi Gawat Darurat

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target	Program	Kegiatan			Satuan	Target 2025	Realisasi Semester I 2025	Persentase Pencapaian
						Uraian	Indikator					
1.	Meningkatkan Kualitas Kesehatan	Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat	Persentase Sumber Daya Kesehatan Sesuai Standar	82%	Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota	Gawat Darurat	Input - Kemampuan Menangani Life Saving di Gawat Darurat		%	100	100	100
							- Pemberi pelayanan kegawat-daruratan bersertifikat (ATLS/BTLS/ACLS/GELS/EIMED) yang masih berlaku		%	100	66	66
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan rumah sakit	85%			- Ketersediaan tim Penanggulangan Bencana		Tim	1	0	0
							Proses	- Jam buka pelayanan gawat darurat	Jam	24	24	100
								- Waktu tanggap pelayanan dokter di Gawat Darurat	Menit	< 5	4	100
								- Tidak adanya keharusan membayar uang muka	%	100	100	100
							Output	- Jumlah yang dilayani				
								- IGD Sistemik	Orang	16478	8583	52,09
							Outcome	- Kepuasan pasien	%	≥ 75	79	100
Rata-rata												77,26

- Instalasi Rawat Jalan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target	Program	Kegiatan			Satuan	Target 2025	Realisasi Semester I 2025	Persentase Pencapaian
						Uraian	Indikator					
2.	Meningkatkan Kualitas Kesehatan	Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat	Persentase Sumber Daya Kesehatan Sesuai Standar	82%	Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota	Rawat Jalan	Input	- Ketersediaan pelayanan	%	100	100	100
								- Dokter pemberi pelayanan di poliklinik spesialis	%	100	100	100
							Proses	- Jam buka pelayanan dengan ketentuan : Senin - kamis (08.00 sd 15.30 wib), Jumat (08.00 sd 16.00 wib)	%	100	76,51	76,51
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan rumah sakit	85%				- Waktu tunggu rawat jalan	Menit	60	46,61	100
								- Waktu tunggu rekam medis	Menit			
								- Penegakan Diagnosis TB melalui pemeriksaan mikroskopis - yang BTA+	%	100	100	100
								- yang BTA+	%	10	9	100
								- Pasien Rawat Jalan TB yang ditangani dengan strategis DOTS	%	100	100	100
								- Ketersediaan Pelayanan VCT (HIV)	%	100	100	100
							Output	- Peresepan obat sesuai formularium	%	99	91,33	92,25
								- Pencatatan dan Pelaporan TB di RS	%	100	100	100
								- **Jumlah Kunjungan**	**orang**	**186768**	**95148**	**50,94**
								- Rawat Jalan	orang	149072	75091	50,37
								- Kemoterapi	orang	5408	2399	44,36
								- Hemodialisa	orang	12784	10505	82,17
								- Thalasemi	orang	19504	7153	36,67
							Outcome	- Kepuasan pasien	%	90	88,75	98,61
Rata-rata												88,79

- Instalasi Rawat Inap

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target	Program	Kegiatan			Satuan	Target 2025	Realisasi Semester I 2025	Persentase Pencapaian
						Uraian	Indikator					
3.	Meningkatkan Kualitas Kesehatan	Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat	Persentase Sumber Daya Kesehatan Sesuai Standar	82%	Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota	Rawat Inap	Input	- Ketersediaan pelayanan	%	100	100	100
								- Pemberi Pelayanan	%	100	100	100
								- Tempat tidur dengan pengaman	%	100	100	100
								- Kamar mandi dengan pengaman pegangan	%	100	100	100
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan rumah sakit	85%				- Dokter penanggung jawab pasien rawat inap	%	100	100	100
								- Jam Visite Dokter Spesialis (08.00 s/d 14.00 wib)	%	100	94,20	94,20
								- Kejadian infeksi pasca operasi	%	≤ 1,5	0	100
								- Kejadian infeksi nosokomial	%	< 1,5	0	100
							Proses	- Tidak adanya kejadian pasien jatuh yang berakibat cacat atau kematian	%	100	100	100
								- Pasien rawat inap tuberculosis yang ditangani dengan strategi DOTS	%	100	100	100
								- Pencatatan dan pelaporan TB di RS	%	100	100	100
							Output	- Kejadian pulang sebelum dinyatakan sembuh	%	< 5	2,06	100
								- Jumlah kunjungan	Kunj	16800	7780	46,31
								- BOR	%	75	73,47	97,96
								- LOS	Hari	4	4,26	100
								- TOI	Hari	≤ 3	1,54	100
								- GDR	‰	< 45	25,71	0
								- NDR	‰	< 25	17,41	0
								- BTO	Kali	50	15,27	30,54
							Outcome	- Kepuasan pasien	%	90	88,48	98,31
Rata-rata												**92,63**

- Instalasi Kebidanan dan Penyakit Kandungan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target	Program	Kegiatan			Satuan	Target 2025	Realisasi Semester I 2025	Persentase Pencapaian
						Uraian	Indikator					
4.	Meningkatkan Kualitas Kesehatan	Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat	Persentase Sumber Daya Kesehatan Sesuai Standar	82%	Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota	Persalinan dan perinatologi	Input	- Pemberi pelayanan persalinan normal :				
								- Dokter	Orang	9	10	100
								- Bidan	Orang	24	24	100
								- Pemberi pelayanan persalinan dengan penyulit :				
								- Dokter	Orang	1	1	100
								- Tim Ponek terlatih	Tim	1	1	100
								- Bidan	Orang	2	2	100
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan rumah sakit	85%				- Pemberi pelayanan persalinan dengan tindakan operatif :				
								- Dokter Sp.OG	Orang	9	10	100
								- Dokter Sp.A	Orang	1	1	100
								- Sp. An	Orang	1	1	100
								- Kemampuan menangani BBLR (1500-2500 gr)	%	100	100	100
								- Kemampuan menangani bayi lahir dengan asfiksia	%	100	100	100
							Proses	- Pertolongan persalinan melalui seksio caesaria non rujukan	%	< 20	11,5	100
								- Pelayanan kontrasepsi mantap dilakukan oleh SpOG atau SpB atau SpU atau dokter umum terlatih	%	100	100	100
								- Konseling peserta KB mantap oleh bidan terlatih	%	100	100	100
							Output	- Kunjungan kamar bersalin :	Orang	**16968**	**8607**	**50,72**
								- Kunjungan rawat	Orang	12400	6131	49,44
								- Kebidanan (IGDM)	Orang	1400	753	53,79
								- Rawat Inap	Orang	3168	1723	54,39
								- Kematian ibu karena persalinan :				
								a. CFR Perdarahan	%	< 1	0	100
								b. CFR	%	< 5	0	100
								c. CFR Sepsis	%	< 0,2	0	100
								- BOR	%	65	64,15	99
								- LOS	Hari	3	2,72	100
								- TOI	Hari	3	1,48	100
								- GDR	‰	< 5	1	0
								- NDR	‰	< 2	2	0
								- BTO	Kali	50	43,79	87,58
							Outcome	- Kepuasan pasien	%	80	85	100
Rata - rata												**88,27**

- *Instalasi Care Unit (ICU)*

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target	Program	Kegiatan			Satuan	Target 2025	Realisasi Semester I 2025	Persentase Pencapaian
						Uraian	Indikator					
5.	Meningkatkan Kualitas Kesehatan	Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat	Persentase Sumber Daya Kesehatan Sesuai Standar	82%	Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota	Pelayanan Intensif Unit (ICU)	Input - Pemberi pelayanan		%	100	100	100
								- Ketersediaan fasilitas dan peralatan ruang ICU :	%	90		
								a. ICU Type B			93	
								b. ICU Sekunder			175	
								- Ketersediaan tempat tidur dengan monitoring dan ventilator		1:1:1	1:0,6:1	100
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan rumah sakit	85%			Proses - Kepatuhan terhadap hand hygiene		%	100	99	0
								- Kejadian infeksi nosokomial	%	≤ 21	0,3	100
							Output - Jumlah Kunjungan		Orang	2800	2046	73,07
								- Pasien yang kembali ke perawatan intensif dengan kasus yang sama < 72 jam :	%	≤ 3	13	100
								- BOR	%	75	78,42	100
								- LOS	Hari	3	3,07	93
								- TOI	Hari	2	0,82	100
								- GDR	‰	< 45	272,24	0
								- NDR	‰	< 25	205,28	0
								- BTO	kali	50	23,39	46,78
							Outcome - Kepuasan pasien		%	≥ 80	93	100
Rata-rata												**91,29**

- Instalasi Kamar Bedah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target	Program	Kegiatan			Satuan	Target 2025	Realisasi Semester I 2025	Persentase Pencapaian
						Uraian	Indikator					
6.	Meningkatkan Kualitas Kesehatan	Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat	Persentase Sumber Daya Kesehatan Sesuai Standar	82%	Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota	Pelayanan Kamar Bedah	Input - Ketersediaan tim bedah		%	90	90	100
								- Ketersediaan fasilitas dan peralatan operasi	%	90	90	100
								- Kemampuan melakukan tindakan operatif	%	90	90	100
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan	85%			Proses - Waktu tunggu operasi elektif		Hari	< 2	2	100
								- Tidak adanya kejadian operasi salah sisi	%	100	100	100
								- Tidak adanya kejadian operasi salah orang	%	100	100	100
								- Tidak adanya kejadian salah tindakan pada operasi	%	100	100	100
								- Tidak adanya kejadian tertinggalnya benda asing/lain pada tubuh pasien seterlah operasi	%	100	100	100
								- Komplikasi anestesi karena overdosis, reaksi anestesi, salah penempatan ET	%	≤ 6	0,1	100
							Output - Jumlah yang dilayani		Tind	8892	4601	51,74
								- Kejadian kematian di meja operasi	%	≤ 1	1	100
							Outcome - Kepuasan pasien		%	≥ 80	82	100
Rata-rata												**95,98**

- Instalasi Pengujian Kesehatan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target	Program	Kegiatan			Satuan	Target 2025	Realisasi Semester I 2025	Persentase Pencapaian
						Uraian	Indikator					
7.	Meningkatkan Kualitas Kesehatan	Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat	Persentase Sumber Daya Kesehatan Sesuai Standar	82%	Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota	Pelayanan Pengujian Kesehatan	Input	- Ketersediaan pelayanan	%	100	100	100
								- Dokter pemberi layanan	%	100	100	100
							Proses	- Jam buka pelayanan dengan ketentuan	%	100	100	100
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan rumah sakit	85%				- Waktu tunggu pelayanan	Menit	20	35	57,10
							Output	- Jumlah kunjungan	Orang	18535	18596	100
							Outcome	- Kepuasan pelanggan	%	≥ 80	83,30	100
Rata-rata												**92,85**

- Instalasi Khusus Wijayakusuma (IKW)

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target	Program	Kegiatan			Satuan	Target 2025	Realisasi Semester I 2025	Persentase Pencapaian
						Uraian	Indikator					
8.	Meningkatkan Kualitas Kesehatan	Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat	Persentase Sumber Daya Kesehatan Sesuai Standar	82%	Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota	Rawat Inap IKW	Input	- Pemberi Pelayanan	%	100	100	100
								- Tempat tidur dengan pengaman	%	100	100	100
								- Kamar mandi dengan pengaman pegangan tangan	%	100	100	100
							Proses	- Waktu tunggu rawat jalan	%	≤ 60	100	100
								- Dokter penanggung jawab pasien rawat inap	%	100	100	100
								- Jam Visite Dokter Spesialis : 08.00 s/d 14.00 wib	%	100	93,84	93,84
								- Kejadian infeksi pasca operasi	%	≤ 0,5	0	0
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan rumah sakit	85%				- Kejadian infeksi nosokomial	%	< 1,5	0	0
								- Tidak adanya kejadian pasien jatuh yang berakibat cacat atau	%	100	100	100
								- Pasien rawat inap tuberculosis yang ditangani dengan strategi DOTS	%	100	0	100
								- Pencatatan dan pelaporan TB di RS	%	100	100	100
							Output	Jumlah yang dilayani :	Orang	**6130**	0	0
								- Rawat jalan	Orang	5350	0	0
								- Rawat inap	Orang	780	0	0
								- Kejadian pulang sebelum dinyatakan sembuh	%	≤ 5	0	100
								- BOR	%	70	30,16	100
								- LOS	Hari	5	2,93	100
								- TOI	Hari	3	6,75	34,60
								- GDR	‰	45	6,41	0
								- NDR	‰	25	0	0
								- BTO	kali	50	9,19	8,26
							Outcome	- Kepuasan pasien	%	90	97,47	108,30
Rata-rata												**89,67**

- Pelayanan Rekam Medik

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target	Program	Kegiatan			Satuan	Target 2025	Realisasi Semester I 2025	Persentase Pencapaian
						Uraian	Indikator					
9.	Meningkatkan Kualitas Kesehatan	Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat	Persentase Sumber Daya Kesehatan Sesuai Standar	82%	Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota	Pelayanan Rekam Medik	Input - Pemberi pelayanan rekam medis		%	100	44	44,00
							Proses - Waktu penyediaan dokumen rekam medis rawat jalan		Menit	< 10	3	100
							- Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat inap		Menit	< 15	15	100
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan rumah sakit	85%			Output - Kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan		%	100	90	90
							- Kelengkapan Informed Concent setelah mendapatkan informasi yang jelas		%	100	89	89
							Outcome - Kepuasan pasien		%	86	86	100
Rata-rata												**87,17**

- Pelayanan Radiologi dan Pusat Diagnostik

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target	Program	Kegiatan			Satuan	Target 2025	Realisasi Semester I 2025	Persentase Pencapaian
						Uraian	Indikator					
10.	Meningkatkan Kualitas Kesehatan	Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat	Persentase Sumber Daya Kesehatan Sesuai Standar	82%	Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota	Pelayanan Radiologi	Input - Pemberi pelayanan radiologi (radiolog & radiografer) :					
								- Dokter Radiolog	%	100	100	100
								- Fisika Medik	%	100	100	100
								- Radiografer	%	100	100	100
								- Perawat Radiologi	%	100	100	100
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan rumah sakit	85%				- Ketersediaan fasilitas dan peralatan radiografi (sesuai kelas RS)	%	100	100	100
							Proses - Waktu tunggu hasil pelayanan foto thorax		Jam	3	8,75	0
								- Kerusakan foto	%	< 1	0,77	100
								- Tidak terjadinya kesalahan pemberian label	%	< 1	0	100
							Output - Jumlah yang dilayani		Orang	50437	24914	49,40
								- Pelaksana Ekspertisi hasil pemeriksaan radiologi	%	100	100	100
								- Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri	%	90	89,00	98,89
							Outcome - Kepuasan pelanggan terhadap pelayanan radiologi		%	90	86,17	95,74
Rata - rata												**94,91**

- Pelayanan Patologi Klinik

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target	Program	Kegiatan			Satuan	Target 2025	Realisasi Semester I 2025	Persentase Pencapaian
						Uraian	Indikator					
11.	Meningkatkan Kualitas Kesehatan	Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat	Persentase Sumber Daya Kesehatan Sesuai Standar	82%	Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota	Pelayanan Patologi Klinik	Input - Pemberi pelayanan laboratorium patologi klinik		%	90	90	100
								- Fasilitan dan peralatan	%	85	80	94,12
							Proses - Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium patologi klinik		Menit	120	48	100
								- Tidak adanya kejadian tertukar specimen	%	100	100	100
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan rumah sakit	85%				- Kemampuan memeriksa HIV – AIDS	%	100	100	100
								- Kemampuan Mikroskopis TB Paru	%	100	100	100
							Output - Jumlah Pemeriksaan		Pem.	809824	471981	58,28
								- Ekspertisi hasil pemeriksaan laboratorium	%	75	76,65	100
								- Tidak adanya kesalahan pemberian hasil pemeriksaan laboratorium	%	100	100	100
								- Kesesuaian hasil pemeriksaan baku mutu eksternal	%	100	99,50	99,50
							Outcome - Kepuasan pelanggan terhadap pelayanan Laboratorium		%	80	79,92	99,90
Rata - rata												**95,62**

- Pelayanan Patologi Anatomi

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target	Program	Kegiatan			Satuan	Target 2025	Realisasi Semester I 2025	Persentase Pencapaian
						Uraian	Indikator					
12	Meningkatkan Kualitas Kesehatan	Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat	Persentase Sumber Daya Kesehatan Sesuai Standar	82%	Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota	Pelayanan Patologi Anatomi	Input	- Pemberi pelayanan laboratorium patologi klinik	%	90	93,33	100
								- Fasilitan dan peralatan	%	90	90	100
							Proses	- Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium patologi klinik	Hari	5	7	0
								- Tidak adanya kejadian tertukar specimen	%	100	100	100
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan rumah sakit	85%			Output	- Jumlah Pemeriksaan	Pem.	4325	2257	52,18
								- Ekspertisi hasil pemeriksaan laboratorium	%	100	100	100
								- Tidak adanya kesalahan pemberian hasil pemeriksaan laboratorium	%	100	100	100
								- Kesesuaian hasil pemeriksaan baku mutu eksternal	%	100	100	100
							Outcome	- Kepuasan pelanggan terhadap pelayanan Laboratorium	%	≥ 80	80	100
Rata-rata												**94,02**

- Pelayanan Rehabilitasi Medik

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target	Program	Kegiatan			Satuan	Target 2025	Realisasi Semester I 2025	Persentase Pencapaian
						Uraian	Indikator					
13.	Meningkatkan Kualitas Kesehatan	Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat	Persentase Sumber Daya Kesehatan Sesuai Standar	82%	Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota	Pelayanan Rehabilitasi Medik	Input	- Pemberi pelayanan rehabilitasi medik	%	100	100	100
								- Fasilitas dan Peralatan Rehabilitasi Medik	%	40	100	100
							Proses	- Tidak adanya kejadian kesalahan tindakan rehabilitasi medik	%	100	100	100
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan rumah sakit	85%			Output	- Jumlah pemeriksaan	Orang	21198	9138	43,11
								- Jumlah tindakan	Tindakan	55426	24049	43,39
								- Kejadian Drop Out pasien terhadap pelayanan Rehabilitasi Medik yang direncanakan	%	< 50	16,57	100
								- Waktu tunggu pelayanan	Menit	25	24,17	96,68
							Outcome	- Kepuasan pelanggan rehabilitasi medik	%	≥ 80	89,04	100
Rata-rata												**85,40**

- Pelayanan Farmasi

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target	Program	Kegiatan			Satuan	Target 2025	Realisasi Semester I 2025	Persentase Pencapaian
						Uraian	Indikator					
14.	Meningkatkan Kualitas Kesehatan	Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat	Persentase Sumber Daya Kesehatan Sesuai Standar	82%	Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota	Pelayanan Farmasi	Input - Pemberi pelayanan farmasi		%	100	100	100
								- Fasilitas dan peralatan pelayanan farmasi	%	100	100	100
								- Ketersediaan formularium (terbaru/updated)	Ada	Ada	Ada	100
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap	85%			Proses - Waktu tunggu pelayanan obat jadi		Menit	30	29,83	100
								- Waktu tunggu pelayanan obat racikan	Menit	60	55,5	100
							Output - Jumlah R/ yang		R/	1920755	1007202	52,44
								- Pelayanan IV admixture	Dosis	37860	20888	55,17
								- Pelayanan Handlying	Dosis	8321	3803	45,70
								- Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian obat	%	100	100	100
								- Kepatuhan penggunaan formularium nasional	%	82	89,67	100
							Outcome - Kepuasan pelanggan farmasi		%	80	81,49	100
Rata-rata												**86,66**

- Pelayanan Gizi dan Dietetik

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target	Program	Kegiatan			Satuan	Target 2025	Realisasi Semester I 2025	Persentase Pencapaian
						Uraian	Indikator					
15.	Meningkatkan Kualitas Kesehatan	Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat	Persentase Sumber Daya Kesehatan Sesuai Standar	82%	Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota	Pelayanan Gizi	Input - Pemberi layanan gizi		%	100	97	97
								- Ketersediaan fasilitas pelayanan gizi	%	100	100	100
								- Ketepatan waktu pemberian makanan pada pasien	%	100	100	100
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan rumah sakit	85%			Proses - Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian diet		%	100	100	100
							Output - Sisa makanan yang tidak dimakan oleh pasien		%	< 20	7,49	100
								Jumlah porsi makan	Porsi	357232	172577	48,31
							Outcome - Kepuasan pelanggan		%	93	96,05	100
Rata-rata												**92,19**

- Pelayanan Transfusi Darah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target	Program	Kegiatan			Satuan	Target 2025	Realisasi Semester I 2025	Persentase Pencapaian
						Uraian	Indikator					
16.	Meningkatkan Kualitas Kesehatan	Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat	Persentase Sumber Daya Kesehatan Sesuai Standar	82%	Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota	Pelayanan Transfusi Darah	Input - Tenaga penyedia pelayanan bank darah rumah sakit		%	100	90	90
								- ketersediaan fasilitas dan peralatan bank darah rumah sakit	%	100	100	100
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan rumah sakit	85%			Proses - Kejadian reaksi transfuse		%	0,01	0,43	0
							Output -Pemenuhan kebutuhan darah untuk pelayanan transfuse di rumah sakit		%	70	100	100
							Outcome - Kepuasan pelayanan transfusi darah		%	≥ 80	80	100
Rata-rata												**97,50**

- Pelayanan Pengolahan Limbah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target	Program	Kegiatan			Satuan	Target 2025	Realisasi Semester I 2025	Persentase Pencapaian
						Uraian	Indikator					
18	Meningkatkan Kualitas Kesehatan	Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat	Persentase Sumber Daya Kesehatan Sesuai Standar	82%	Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota	Pelayanan Pengolahan Limbah	Input	- Adanya penanggung jawab pengelola limbah rumah sakit	Berkas	Ada SK Direktur sesuai kelas RS menurut PerMenkes No.7 Tahun 2019	Ada SK Direktur sesuai kelas RS menurut PerMenkes No.7 Tahun 2019	100
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan rumah sakit	85%				- Ketersediaan fasilitas dan peralatan pengelolaan limbah padat, cair di rumah sakit	Berkas	Sesuai dengan persyaratan kelas RS menurut PerMenKes RI No.7/2019 dan persyaratan PerMenLH No.68 Tahun 2016 dan PerMenLHK No. 5 Tahun 2021	Sesuai dengan persyaratan kelas RS menurut PerMenKes RI No.7/2019 dan persyaratan PerMenLH No.68 Tahun 2016 dan PerMenLHK No. 5 Tahun 2021	100
							Proses	- Pengelolaan limbah cair	M3	Sesuai dengan persyaratan kelas RS PerMenKes No.7/2019 dan persyaratan PerMenLHK No.68/2016 dan PerMenLHK No. 5/2021	Sesuai dengan persyaratan kelas RS PerMenKes No.7/2019 dan persyaratan PerMenLHK No.68/2016 dan PerMenLHK No. 5/2021	100
								- Pengelolaan limbah padat medis	Kg	Sesuai dengan persyaratan kelas RS dan persyaratan PerMenKes RI No.7/2019, PerMenLHK No. 56 Tahun 2015 dan No. 6 Tahun 2021	Sesuai dengan persyaratan kelas RS dan persyaratan PerMenKes RI No.7/2019, PerMenLHK No. 56 Tahun 2015 dan No. 6 Tahun 2021	100
							Output	- Baku mutu limbah cair				
									Mg/l	a. BOD ≤ 30	7,17	100
									Mg/l	b. COD 100	24,17	100
									Mg/l	c. TSS ≤ 30	10,33	100
									Mg/l	d. pH 6-9	1,04	100
								- Pengelolaan limbah B3				
								a. Limbah B3 Medis RS (manifest)	Kg	151000	78705	52,12
								b. Limbah padat B3 Non Medis RS	Kg	725	360	49,66
								b. Limbah Cair	M^3	103500	48330	46,70
								c. Limbah domestik	Kg	860500	427000	49,62
								- Pengolahan bank				
								a. Limbah non infeksi (plabot, jerigen)	Kg	1525	783	51,34
								b. Limbah domestik (kardus, kertas, plastik)	Kg	4925	3103	63,01
							Outcome	Terpenuhinya pengolahan limbah padat dan cair sesuai dengan PerMenKes RI No.7/2019	%	100	100	100
Rata-rata												**80,83**

- Pelayanan Administrasi dan Manajemen

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target	Program	Kegiatan			Satuan	Target 2025	Realisasi Semester I 2025	Persentase Pencapaian
						Uraian	Indikator					
19	Meningkatkan Kualitas Kesehatan	Meningkatkan kinerja administrasi dan keuangan yang efisien, efektif dan akuntabel	Persentase Sumber Daya Kesehatan Sesuai Standar	82%	Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota	Pelayanan Umum, Administrasi dan Manajemen	Input - Kelengkapan pangisian jabatan sesuai persyaratan jabatan		%	100	100	100
								- Adanya peraturan internal rumah sakit	Ada	Ada	Ada	100
								- Adanya peraturan karyawan rumah sakit	Ada	Ada	Ada	100
								- Adanya daftar urutan kepangkatan karyawan	Ada	Ada	Ada	100
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan rumah sakit	85%				- Adanya perencanaan strategi bisnis rumah	Ada	Ada	Ada	100
								- Adanya perencanaan pengembangan SDM	Ada	Ada	Ada	100
							Proses	- Tindak lanjut penyelesaian hasil	%	100	100	100
								- Ketepatan waktu pengusulan kenaikan	%	100	100	100
								- ketepatan waktu pengurusan gaji	%	100	100	100
								- Pelaksanaan rencana pengembangan SDM	%	100	100	100
								- Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan	%	100	100	100
								- Kecepatan waktu pemberian informasi tagihan pasien rawat	Jam	≤ 1	30	100
							Output	- Cost recovery	%	100	94,23	94,23
								- Kelengkapan pelaporan	%	100	100	100
								- Karyawan mendapat pelatihan minimal 20	%			
								a. Struktural		90	87	96,67
								b. Fungsional		950	408	42,95
								- Ketepatan waktu pemberian insentif	%	100	100	100
							Outcome	- Kepuasan peserta	%	90	91	100
Rata-rata												**96,32**

- Pelayanan Ambulance

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target	Program	Kegiatan			Satuan	Target 2025	Realisasi Semester I 2025	Persentase Pencapaian
						Uraian	Indikator					
20	Meningkatkan Kualitas Kesehatan	Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat	Persentase Sumber Daya Kesehatan Sesuai Standar	82%	Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota	Pelayanan Ambulance dan Mobil Jenazah	Input	- Ketersediaan pelayanan Mobil Ambulans dan mobil Jenazah	Jam	24	24	100
								Perjalanan mobil Ambulance :				
								- Dalam kota Tangerang	Kali	250	107	42,80
								- Luar Tangerang	Kali	10	5	50
								Perjalanan Mobil Jenazah :				
								- Dalam Kota/Tangerang	Kali	400	234	58,50
								- Luar Tangerang	Kali	3	2	66,67
								- Penyedia pelayanan ambulance dan mobil jenazah (supir terlatih)	%	100	100	100
								Perjalanan Mobil Operasional :				
								- Dalam Kota/Tangerang	Kali	450	235	52,22
								- Luar Tangerang	Kali	250	74	29,60
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan rumah sakit	85%			Proses	- Kecepatan memberikan pelayanan				
								- Dalam Kota/Tangerang	Menit	30	30	100
								- Luar Tangerang	Jam	6	6	100
								- Waktu tanggap pelayanan ambulance kepada masyarakat yang membutuhkan :				
								- Dalam Kota/Tangerang	Menit	30	30	100
								- Luar Tangerang	Jam	3	3	100
							Output	- Tidak terjadinya kecelakaan ambulans/mobil jenazah yang menyebabkan kecacatan atau kematian	%	100	100	100
							Outcome	- Kepuasan pelayanan ambulance dan mobil jenazah	%	80	80	100
Rata-rata												**78,56**

- Pelayanan Perawatan Jenazah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target	Program	Kegiatan			Satuan	Target 2025	Realisasi Semester I 2025	Persentase Pencapaian
						Uraian	Indikator					
21	Meningkatkan Kualitas Kesehatan	Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat	Persentase Sumber Daya Kesehatan Sesuai Standar	82%	Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota	Pelayanan Pemulasaraan Jenazah	Input	- Ketersediaan pelayanan pemulasaran jenazah	%	100	100	100
								- ketersediaan fasilitas kamar jenazah	Tersedia	Tersedia	Tersedia	100
								- ketersediaan tenaga di instalasi perawatan jenazah	SK Direktur	Tersedia	Tersedia	100
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan rumah sakit	85%			Proses	- Waktu tanggap pelayanan pemulasaraan jenazah	%	90	90	100
								- Perawatan jenazah sesuai standar universal precaution	%	100	100	100
								- Kepatuhan pemberian identifikasi jenazah	%	100	100	100
								- Kepatuhan kebersihan tangan	%	100	100	100
								- Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri	%	100	100	100
							Output	- Jumlah	Tindakan	5600	2553	45,59
							Outcome	- Kepuasan perawatan jenazah	%	80	81	100
Rata-rata												**94,56**

- Pelayanan Sterilisasi dan Laundry

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target	Program	Kegiatan			Satuan	Target 2025	Realisasi Semester I 2025	Persentase Pencapaian
						Uraian	Indikator					
22	Meningkatkan Kualitas Kesehatan	Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat	Persentase Sumber Daya Kesehatan Sesuai Standar	82%	Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota	Pelayanan Laundry	Input	- Ketersediaan pelayanan laundry	Ada	Tersedia	Tersedia	100
								- Adanya penanggungjawab pelayanan laundry	SK	Tersedia SK direktur	Tersedia	100
								- Ketersediaan fasilitas dan peralatan laundry	Ada	Tersedia	Tersedia	100
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan rumah sakit	85%			Proses	- Ketepatan waktu penyedian linen untuk ruang rawat inap dan ruang pelayanan	%	100	100	100
								- Ketepatan waktu penyedian alat instrument untuk kamar bedah dan pelayanan rawat inap	%	100	100	100
								- Ketepatan pengelolaan linen enfeksius	%	100	100	100
								- Kegagalan uji bowidick test	%	0	0	100
								- Ketersediaan linen	%	3 set x jumlah tempat tidur	100	100
								- Linen yang di cuci ulang (rewash)	%	2	1,8	100
							Output	- Ketersediaan linen steril untuk kamar operasi	%	100	100	100
								- Jumlah pelayanan : Laundry	Kg	288.400	164746	57,12
								Instrumen dan linen steril	Paket	131.062	82270	62,77
								Kassa Steril	Paket	160.680	90365	56,24
							Outcome	Kepatuhan pengamanan alat pelindung diri	%	98	98	100
Rata-rata												**91,15**

- Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI)

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target	Program	Kegiatan			Satuan	Target 2025	Realisasi Semester I 2025	Persentase Pencapaian
						Uraian	Indikator					
24	Meningkatkan Kualitas Kesehatan	Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat	Persentase Sumber Daya Kesehatan Sesuai Standar	82%	Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota	Pencegahan dan pengedalian infeksi	Input	- Adanya anggota tim PPI yang terlatih	%	75	90	100
								- Ketersediaan APD disetiap instalasi/departemen	%	75	90	100
								- Rencana program PPI	Dok	Ada	Ada	100
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan rumah sakit	85%			Proses	- Pelaksanaan program PPI sesuai rencana	%	100	100	100
								- Kepatuhan kebersihan KKP	%	85	91	100
								- Penggunaan APD saat melaksanakan tugas	%	100	100	100
							Output	- Kegiatan pencatatan dan pelaporan infeksi nosokomial/health care associated infection (HAI) di rumah sakit.	%	100	100	100
								- Angka kejadian infeksi nosokomial	%	≤ 1,5	0,12	100
							Outcome	- Tambahan angka kejadian infeksi :				
								- Infeksi daerah operatif (IDO)	%	≤ 2	0,05	100
								- Infeksi saluran kemih (ISK)	‰	4,7	0	0
								- Ventilator assosiated pneumonia (VAP)	‰	≤ 5,8	0,29	0
								- Hospital acquared pneumonia (HAP)	‰	≤ 1	0	0
								- Infeksi aliran darah primer (IADP)	%	≤ 3,5	0,47	0
								- Dekubitus	%	≤ 2	0,05	0
								- Flebitis	%	≤ 1	0,22	0
Rata-rata												**100**

- Pelayanan Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP)

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target	Program	Kegiatan			Satuan	Target 2025	Realisasi Semester I 2025	Persentase Pencapaian
						Uraian	Indikator					
26	Meningkatkan Kualitas Kesehatan	Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat	Persentase Sumber Daya Kesehatan Sesuai Standar	82%	Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota	Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien	Input	- Adanya anggota tim PMKP yang terlatih	%	80	86	100
								- Adanya pedoman PMKP	Dok	1	1	100
								- Rencana program PMKP	Dok	1	1	100
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan rumah sakit	85%			Proses	- Memantauan indikator mutu berkala :				
								- INM	%	70	73,06	100
								- IMP RS	%	70	66,74	95,34
								- IMP UNIT	%	70	77,06	100
								- SKP	%	70	58,3	83,29
							Output	- Laporan evaluasi program PMKP berdasarkan STARKES 2022	Dok	1	1	100
							Outcome	- Kepuasan pasien terhadap pelayanan RS	%	76,5	81	100
Rata-rata												**97,63**

- Pelayanan Pasien dengan Jaminan BPJS dan Jaminan Lainnya

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target	Program	Kegiatan			Satuan	Target 2025	Realisasi Semester I 2025	Persentase Pencapaian
						Uraian	Indikator					
17	Meningkatkan Kualitas Kesehatan	Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat	Persentase Sumber Daya Kesehatan Sesuai Standar	82%	Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota	Pelayanan pasien dengan jaminan BPJS dan jaminan lainnya	Input	- Ketersediaan pelayanan untuk keluarga miskin	Ada	Ada	Ada	100
								- Adanya kebijakan rumah sakit untuk pelayanan keluarga miskin	Ada	Ada	Ada	100
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan rumah sakit	85%			Proses	- Waktu tunggu verifikasi kepesertaan pasien keluarga miskin	Menit	≤ 15	30	50
								- Tidak adanya biaya tambahan yang ditagihkan pada keluarga miskin	Dok	100	100	100
							Output	- Semua pasien keluarga miskin yang dilayani	Ada	Ada	Ada	100
							Outcome	- Kepuasan pelanggan	%	81	87,5	100
Rata-rata												**91,67**

- Pelayanan Keamanan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target	Program	Kegiatan			Satuan	Target 2025	Realisasi Semester I 2025	Persentase Pencapaian
						Uraian	Indikator					
25	Meningkatkan Kualitas Kesehatan	Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat	Persentase Sumber Daya Kesehatan Sesuai Standar	82%	Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota	Pelayanan Keamanan	Input	- Petugas keamanan bersetifikat mempunyai keterangan pernah bekerja sebagai Satpam	Orang	80	79	98,75
								- Sistem pengamanan/protap	Ada	Ada	Ada	100
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan rumah sakit	85%			Proses	- Melakukan patroli/keliling (1 jam sekali sesuai dg kebutuhan)	Jam	2 jam Sekali	2 jam Sekali	100
								- Evaluasi terhadap sistem keamanan	Triwulan	4	2	50
							Output	- Tidak adanya barang milik pasien, pengunjung, karyawan yang hilang	%	100	0,54	99.46
							Outcome	- Kepuasan pasien	%	90	80	88,89
Rata - Rata												**72,94**

- Pelayanan IPS RS

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target	Program	Kegiatan			Satuan	Target 2025	Realisasi Semester I 2025	Persentase Pencapaian
						Uraian	Indikator					
23	Meningkatkan Kualitas Kesehatan	Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat	Persentase Sumber Daya Kesehatan Sesuai Standar	82%	Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota	Pelayanan Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit	Input	- Adanya penanggung jawab IPSRS	Ada	Ada	Ada	100
								- Ketersediaan bengkel kerja	Tersedia	Tersedia	Tersedia	100
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan rumah sakit	85%			Proses	- Waktu tanggap kerusakan atat ≤ 15 menit	%	80	86,73	100
								- Ketepatan waktu pemeliharaan alat sesuai jadwal pemeliharaan	%	100	100	100
								- Ketepatan waktu kalibrasi alat	%	100	100	100
							Output	- Alat ukur dan alat laboratorium yang dikalibrasi tepat waktu	%	100	100	100
Rata-rata												**100**

- Pelayanan Diklat dan Litbang

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target	Program	Kegiatan			Satuan	Target 2025	Realisasi Semester I 2025	Persentase Pencapaian
						Uraian	Indikator					
29	Meningkatkan Kualitas Kesehatan	Terselenggaranya pendidikan, pelatihan dan penelitian di bidang kedokteran dan kesehatan lainnya sesuai dengan rumah sakit kelas B Pendidikan	Persentase Sumber Daya Kesehatan Sesuai Standar	82%	Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota	Pelayanan diklat dan litbang	Input	- Kebijakan / pedoman / panduan prosedur penyelenggaraan diklat dan penelitian	Dok	10	8	80,00
								- Perjanjian kerjasama dengan institusi pendidikan	Dok	20	12	60,00
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan rumah sakit	85%				- Pembimbing klinik yang kompeten :				
								- Clinical instruktur keperawatan dan tenaga kesehatan	Orang	150	87	58,00
								- Dosen pembimbing klinik (Dodiknis)	Orang	27	23	85,19
								- Ada program pelatihan dan penelitian	Dok	1	2	100
							Proses	- Penyelenggaraan/pengiriman kegiatan (seminar / bimtek / kursus / workshop)	Orang	300	231	77,00
								- Pelaksanaan bimbingan mahasiswa	Dok	100	81	81,00
								- Jumlah mahasiswa yang praktek di RSU Tangerang	Orang	5000	3610	72,20
							Output	- Prosentase pegawai yang dilatih minimal 20 jam/tahun				
								- Struktural	Orang	90	87	96,67
								- Fungsional	Orang	950	408	42,95
								- Adanya kegiatan penelitian:				
								- Jumlah penelitian oleh pegawai	Dok	2	1	50,00
								- Penelitian yang dipublikasikan	Dok	1	1	100
								- Penelitian oleh institusi lain	Dok	200	67	33,50
							Outcome	- Indeks kepuasan peserta diklat	%	80	91	100
								- Efektivitas diklat	%	80	85,33	100
Rata-rata												**75,77**

- Pelayanan PONEK

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target	Program	Kegiatan			Satuan	Target 2025	Realisasi Semester I 2025	Persentase Pencapaian
						Uraian	Indikator					
28	Meningkatkan Kualitas Kesehatan	Terselenggaranya Pelayanan PONEK	Persentase Sumber Daya Kesehatan Sesuai	82%	Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota	Pelayanan PONEK	Input	- Tim Ponek	%	100	100	100
								- Sarana rumah sakit, alat, bangunan dan SDM	%	ada yg belum sesuai	ada yg belum sesuai	100
								- adanya SOP	Dok	30	30	100
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan rumah sakit	85%			Proses	- AMP (ibu dan bayi)	Kasus	12	Terpenuhi	100
								- Waktu tunggu IGD :				
								- Respon time	Menit	< 10	Terpenuhi	100
								- Evaluasi untuk diagnostik	Menit	< 15	Terpenuhi	100
								- Tindakan awal	Menit	< 30	Terpenuhi	100
								- Tindakan definitif	Menit	50	Tidak Terpenuhi	100
							Output	- Poned Terbina (PKM)	%	100	100	100
								Kejadian kematian ibu karena (CFR) :				
								a. Perdarahan	%	≤ 1	0	100
								b. Preeklamsi/eklamsi (FEB)	%	≤ 30	0	100
								c. Sepsis	%	0,2	0	100
								- Pertolongan persalinan melalui SC	%	≤ 45	11,5	100
								- Inisiasi Menyusu Dini (IMD)	%	70	100	100
							Outcome	- Indeks kepuasan masyarakat	%	≥ 80	85	100
Rata - rata												**100**

- Pelayanan Jantung Terpadu

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target	Program	Kegiatan			Satuan	Target 2025	Realisasi Semester I 2025	Persentase Pencapaian
						Uraian		Indikator				
27	Meningkatkan Kualitas Kesehatan	Terselenggaranya Pelayanan Jantung Terpadu	Persentase Sumber Daya Kesehatan Sesuai Standar	82%	Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota	Pelayanan Jantung Vaskuler Terpadu	Input	- Dokter Spesialis Jantung	Orang	6	6	100
								- Dokter Spesialis Radiologi	Orang	5	4	80
								- Dokter Spesialis Bedah:				
								- Bedah Vaskuler	Orang	2	2	100
								- Bedah Tumor	Orang	2	2	100
								- Dokter Spesialis Cardiac	Orang	1	0	0
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan rumah sakit	85%				- Dokter Anesthesi	Orang	2	2	100
								- Tenaga Perawat	Orang	7	4	57,14
								- Tenaga Teknik Cardiovasculer	Orang	2	0	0
								- Tenaga Radiografer	Orang	2	2	100
								- Tenaga Farmasi	Orang	1	1	100
							Proses	- Ketersediaan pelayanan setiap hari pada jam kerja	Jam	24	7	29,17
							Output	- Jumlah pelayanan	Pem	9657	5569	57,67
							Outcome	- Indeks kepuasan masyarakat	%	85	84	98,82
Rata - Rata												**83,89**

Tabel 2.2
Program Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target	Program	Uraian			Satuan	Target 2025	Realisasi Semester I 2025	Persentase Pencapaian
						Sub kegiatan	Indikator					
1.	Meningkatkan Kualitas Kesehatan	Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat	Persentase Capaian Kinerja Administrasi dan Keuangan	100%	Penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	1.1. Penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Output	- Jumlah dokumen perencanaan perangkat Daerah	Dok	4	2	50
							Outcome	- Kepuasan pasien	%	85	85	100
Rata-rata												**75**

- Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target	Program	Uraian			Satuan	Target 2025	Realisasi Semester I 2025	Persentase Pencapaian
						Sub kegiatan	Indikator					
2.	Meningkatkan Kualitas Kesehatan	Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat	Persentase Capaian Kinerja Administrasi dan Keuangan	100%	Penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	2.1. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Output	- Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang	620	620	100
							Outcome	- Kepuasan pasien	%	85	85	100
Rata-rata												**100**

- Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target	Program	Uraian		Satuan	Target 2025	Realisasi Semester I 2025	Persentase Pencapaian
						Sub kegiatan	Indikator				
3.	Meningkatkan Kualitas Kesehatan	Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat	Persentase Capaian Kinerja Administrasi dan Keuangan	100%	Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	3.1. Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Output - Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	Unit	28	28	100
							Outcome - Kepuasan pasien	%	85	85	100
Rata-rata											100

- Kegiatan : Peningkatan Pelayanan BLUD

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target	Program	Uraian		Satuan	Target 2025	Realisasi Semester I 2025	Persentase Pencapaian
						Sub kegiatan	Indikator				
4.	Meningkatkan Kualitas Kesehatan	Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat	Persentase Capaian Kinerja Administrasi dan Keuangan	100%	Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	4.1. Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD	Output - Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	Unit Kerja	1	1	100
							Outcome - Kepuasan pasien	%	85	85	100
Rata-rata											100

Tabel 2.3
Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

1. Kegiatan : Penyediaan Faslitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM Dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target	Program	Uraian		Satuan	Target 2025	Realisasi Semester I 2025	Persentase Pencapaian
						Sub kegiatan	Indikator				
5.	Meningkatkan Kualitas Kesehatan	Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat	Persentase Sumber Daya Kesehatan Sesuai Standar	82%	Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	5.1 Pengadaan alat kesehatan / alat penunjang fasilitas kesehatan	Output - Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	Unit	58	53	91,38
							Outcome - Kepuasan pasien	%	85	85	100
						5.2 Pengadaan dan pemeliharaan alat kalibrasi	Output - Jumlah penyediaan dan pemeliharaan alat uji dan kalibrasi pada unit pemeliharaan fasilitas kesehatan regional/regional maintainance center	Unit	2458	2049	83,36
							Outcome - Kepuasan pasien	%	85	85	100
						5.3 Pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan/alat penunjang fasilitas pelayanan kesehatan	Output - Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas Layanan kesehatan yang Terpelihara sesuai standar	Unit	2533	1900	75,01
							Outcome - Kepuasan pasien	%	85	85	100
						5.4 Pengadaan obat, bahan habis pakai, bahan medis habis pakai, vaksin makanan dan minuman di fasilitas kesehatan	Output - Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Paket	2	2	100
							Outcome - Kepuasan pasien	%	85	85	100
Rata-rata											93,72

2. Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target	Program	Uraian		Satuan	Target 2025	Realisasi Semester I 2025	Persentase Pencapaian
						Sub kegiatan	Indikator				
6.	Meningkatkan Kualitas Kesehatan	Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat	Persentase Sumber Daya Kesehatan Sesuai Standar	82%	Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	6.1 Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Output - Jumlah dokumen operasional pelayanan Rumah Sakit	Dok	1	1	100
							Outcome - Kepuasan pasien	%	85	85	100
Rata-rata											100

- Kinerja Pelayanan dan Pendukung Layanan

Tabel 2.4
Kinerja Pelayanan RSUD Kabupaten Tangerang Semester I Tahun 2025

No	Bagian	Satuan	Target Tahun 2025	Realisasi Semester I Tahun 2025	%
1	**Pelayanan Kesehatan perorangan di semua lini pelayanan rumah Sakit**				
a.	**Pelayanan**				
1	**Rawat Jalan**	**Kunj**	**204.518**	**103.556**	**50,63**
	- Inst. R. Jalan	Kunj	149.072	75.091	50,37
	- Klinik Kebidanan	Kunj	12.400	6.131	49,44
	- R. Jalan IKW	Kunj	5.350	2.277	42,56
	- Kemoteraphy	Kunj	5.408	2.399	44,36
	- Thalasemia	Kunj	19.504	10.505	53,86
	- Hemodialisa	Kunj	12.784	7.153	55,95
2	**Rawat Inap**	**Kunj**	**23.940**	**13.241**	**55,31**
	- Inst. R. Inap	Kunj	16.800	7.780	46,31
	- R. Inap Kebidanan + dengan Perina Bawah dan RG	Kunj	3.168	1.723	54,39
	- R. Inap IKW	Kunj	780	312	40,00
	- ICU	Kunj	3.192	2.046	64,10
	- Observasi IGD	Kunj		1.380	
3	**Gawat Darurat**	**Kunj**	**17.878**	**9.339**	**52,24**
	- Inst. Gawat Darurat	Kunj	16.478	8.586	52,11
	- Maternal Emergency	Kunj	1.400	753	53,79
4	**Kamar Bedah**	**Kunj**	**8.892**	**4.601**	**51,74**
5	**Medical Check Up**	**Kunj**	**18.535**	**18.596**	**100,33**

Tabel 2.5
Kinerja Pendukung Pelayanan RSUD Kabupaten Tangerang Semester I Tahun 2025

No	Bagian	Satuan	Target Tahun 2025	Realisasi Semester I Tahun 2025	%
1	**Pelayanan Kesehatan perorangan di semua lini pelayanan rumah Sakit**				
b.	**Pendukung Pelayanan**				
1	**Farmasi**	**R/**	**1.920.755**	**1.007.202**	**52,44**
2	**Laboratorium :**				
	Laboratorium Klinik	Pel	809.824	473.059	58,42
	Bank Darah	Pel	147.266	78.927	53,59
	Laboratorium Patologi Anatomi	Pel	4.325	2.257	52,18
3	**Radiologi & Diagnostik Elektromedik**	**Pel**	**50.437**	**24.914**	**49,40**
4	**Rehabilitasi Medik**	**Pel**	**55.426**	**24.049**	**43,39**
5	**Pemulasaraan Jenazah**	**Orang**	**5.600**	**2.553**	**45,59**
6	**CSSD & Laundry :**				
	- Laundry	Kg	288.400	164.746	57,12
	- Instrumen dan linen steril	Paket	131.062	82.270	62,77
	- Kassa steril	Paket	160.680	90.365	56,24
7	**Gizi dan Dietetik :**				
	- Makanan lengkap pasien	Porsi	357.232	172.773	48,36
	- Makanan lengkap Karyawan	Porsi	176.540	92.207	52,23
	- Pemberian snack	Porsi	184.677	76.380	41,36
8	**Diklat**	**Orang**	**15.754**	**7.615**	**48,34**
9	**Pengelolaan Limbah B3 :**				
	- Limbah B3 Medis RS	Kg	151.000	78.705	52,12
	- Limbah B3 Non Medis RS	Kg	725	360	49,66
	- Limbah B3 Medis RS	M^3	103.500	48.330	46,70
	- Limbah B3 Medis RS	Kg	860.500	427.000	49,62
	Pengelolaan Bank Sampah :				
	- Limbah Non Infeksius	Kg	1.525	783	51,34
	- Limbah Domestik	Kg	4.925	3.103	63,01

b. Kinerja pendapatan BLUD

Kinerja pendapatan RSUD Kabupaten Tangerang pada Semester I Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6

Kinerja Pendapatan RSUD Kabupaten Tangerang Semester I Tahun 2025

NO	URAIAN	TARGET TAHUN 2025	SEMESTER I TAHUN 2025		LEBIH/(KURANG) +/-
			KEUANGAN	% KEU	
A.	**Pendapatan Jasa Pelayanan Umum :**	**21.400.000.000**	**12.518.788.899**	**58,50**	**(8.881.211.101)**
1	Pelayanan Pasien Umum	18.000.000.000	9.302.310.848	51,68	(8.697.689.152)
2	Pelayanan Medical Check Up	1.300.000.000	2.022.632.007	155,59	722.632.007
3	Pelayanan Diklat	2.000.000.000	1.121.231.960	56,06	(878.768.040)
4	Pelayanan Ambulance	100.000.000	72.614.084	72,61	(27.385.916)
B.	**Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah :**	**297.484.600.000**	**160.077.305.477**	**53,81**	**(137.407.294.523,00)**
1	Pelayanan Peserta BPJS	284.342.000.000	152.520.302.627	53,64	(131.821.697.373)
2	Pelayanan Peserta BPJS Ketenagakerjaan	1.800.000.000	828.210.930	46,01	(971.789.070)
3	Pelayanan Peserta Jamkesda Kabupaten Tangerang	250.000.000	707.653.142	283,06	457.653.142
4	Pelayanan Peserta Jamkesda Kota Tangerang	180.000.000	113.558.500	63,09	(66.441.500)
5	Pelayanan Peserta Jamkesda Bogor	150.000.000	0	0,00	(150.000.000)
6	Pelayanan Pasien Jaminan Jasaraharja	4.000.000.000	1.855.332.035	46,38	(2.144.667.965)
7	Pelayanan Pasien Hasil Kerjasama Lainnya	3.120.000.000	1.502.820.000	48,17	(1.617.180.000)
8	Parkir	780.000.000	390.000.000	50,00	(390.000.000)
9	Sewa Lahan	267.600.000	554.250.000	207,12	286.650.000
10	Lab Ina Respond	20.000.000	11.994.652	59,97	(8.005.348)
11	Bunga Bank	2.455.000.000	1.547.015.651	63,01	(907.984.349)
12	Lain-lain	120.000.000	46.167.940	38,47	(73.832.060)
PENDAPATAN		**318.884.600.000**	**172.596.094.376**	**54,12**	**(146.288.505.624)**

c. Biaya BLUD

Realisasi kegiatan biaya BLUD RSUD Kabupaten Tangerang yang telah dilaksanakan pada Semester I Tahun 2025 dapat digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 2.7

Realisasi Biaya BLUD RSUD Kabupaten Tangerang Semester I Tahun 2025

NO	URAIAN	PAGU TAHUN 2025	REALISASI SEMESTER I TAHUN			LEBIH / (KURANG) +/-
			KEUANGAN	%		
				KEU	FISIK	
	BELANJA	**318.884.600.000**	**166.579.289.536**	**52,24**	**55,86**	**(152.305.310.464)**
1	**BELANJA PEGAWAI**	**73.026.212.000**	**36.374.359.599**	**49,81**	**49,81**	**(36.651.852.401)**
	- Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	73.026.212.000	36.374.359.599	49,81	49,81	(36.651.852.401)
2	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**241.135.312.675**	**126.270.385.348**	**52,36**	**57,14**	**(114.864.927.327)**
	Belanja Barang	**96.360.642.967**	**46.503.787.764**	**48,26**	**57,77**	**(49.856.855.203)**
	- Belanja Barang Pakai Habis	94.656.918.471	46.050.393.964	48,65	58,28	(48.606.524.507)
	- Belanja Barang Tak Habis Pakai	1.703.724.496	453.393.800	26,61	28,96	(1.250.330.696)
	Belanja Jasa	**127.122.444.708**	**70.927.338.421**	**55,79**	**56,63**	**(56.195.106.287)**
	- Belanja Jasa Kantor	116.395.174.708	66.249.997.039	56,92	57,42	(50.145.177.669)
	- Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	2.304.000.000	1.428.307.632	61,99	61,99	(875.692.368)
	- Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	220.000.000	120.435.000	54,74	54,74	(99.565.000)
	- Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	550.000	550.000	100	100	-
	- Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	1.000.000.000	25.840.000	2,58	2,58	(974.160.000)
	- Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	6.045.000.000	2.757.704.589	45,62	53,47	(3.287.295.411)
	- Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	50.000.000	15.000.000	30,00	30,00	(35.000.000)
	- Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	1.075.720.000	319.904.161	29,74	29,74	(755.815.839)
	- Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	32.000.000	9.600.000	30,00	30,00	(22.400.000)
	Belanja Pemeliharaan	**12.420.425.000**	**7.920.757.715**	**63,77**	**66,53**	**(4.499.667.285)**
	- Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6.000.425.000	2.968.569.858	49,47	51,81	(3.031.855.142)
	- Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	4.690.000.000	3.736.217.506	79,66	83,97	(953.782.494)
	- Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.700.000.000	1.186.570.351	69,80	69,80	(513.429.649)
	- Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	30.000.000	29.400.000	98,00	98,00	(600.000)
	Belanja Perjalanan Dinas	**996.000.000**	**313.283.649**	**31,45**	**32,15**	**(682.716.351)**
	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	996.000.000	313.283.649	31,45	32,15	(682.716.351)
	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	**4.235.800.000**	**605.217.799**	**14,29**	**36,27**	**(3.630.582.201)**
	- Belanja Jasa yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	4.235.800.000	605.217.799	14,29	36,27	(3.630.582.201)
3	**BELANJA MODAL**	**4.723.075.325**	**3.934.544.589**	**83,30**	**84,13**	**(788.530.736)**
	- Belanja Modal Alat Besar	117.000.000	110.213.400	94,20	94,20	(6.786.600)
	- Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	1.000.000	962.500	96,25	96,25	(37.500)
	- Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.934.039.600	1.572.491.720	81,31	81,31	(361.547.880)
	- Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	109.000.000	0	0,00	0,00	(109.000.000)
	- Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	2.537.615.725	2.226.456.969	87,74	89,28	(311.158.756)
	- Belanja Modal Alat Laboratorium	24.420.000	24.420.000	100	100	-

d. Realisasi Pendapatan dan Belanja Semester I Tahun 2025

Realisasi pendapatan dan belanja sampai dengan semester I Tahun 2025 Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.8
Realisasi Pendapatan dan Belanja RSUD Kabupaten Tangerang
Semester I Tahun 2025

URAIAN	PAGU TAHUN 2025	REALISASI SEMESTER I			LEBIH / (KURANG) (+/-)
		KEUANGAN	%		
			KEU	FISIK	
PENDAPATAN	**318.884.600.000**	**172.596.094.376**	**54,12**	**54,12**	**(146.288.505.624)**
BELANJA	**565.175.538.354**	**281.692.961.142**	**49,84**	**64,60**	**(283.482.577.212)**
Urusan Pemerintah Bidang Kesehatan					
Progam Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**451.386.630.554**	**233.208.555.887**	**51,66**	**64,87**	**(218.178.074.667)**
Kegiatan Perencanaan, Pengganggaran, dan Evaluasi Kinerja	**34.670.000**	**18.503.860**	**53,37**	**54,00**	**(16.166.140)**
- Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	34.670.000	18.503.860	53,37	54,00	(16.166.140)
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**130.382.078.354**	**64.663.439.391**	**49,60**	**49,60**	**(65.718.638.963)**
- Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	130.382.078.354	64.663.439.391	49,60	49,60	(65.718.638.963)
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	**2.085.282.200**	**1.947.323.100**	**93,38**	**100**	**(137.959.100)**
- Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.085.282.200	1.947.323.100	93,38	100	(137.959.100)
Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD	**318.884.600.000**	**166.579.289.536**	**52,24**	**55,86**	**(152.305.310.464)**
- Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	318.884.600.000	166.579.289.536	52,24	55,86	(152.305.310.464)
Progam Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya	**113.788.907.800**	**48.484.405.255**	**42,61**	**64,34**	**(65.304.502.545)**
Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**109.687.232.800**	**46.847.758.802**	**42,71**	**80,01**	**(62.839.473.998)**
- Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik	53.264.869.490	16.158.771.433	30,34	91,38	(37.106.098.057)
- Sub Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	1.997.383.000	1.298.165.000	64,99	84,00	(699.218.000)
- Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	2.998.000.000	2.292.619.000	76,47	78,00	(705.381.000)
- Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	51.426.980.310	27.098.203.369	52,69	66,65	(24.328.776.941)
Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	**4.101.675.000**	**1.636.646.453**	**39,90**	**48,68**	**(2.465.028.547)**
- Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Rumah Sakit	4.101.675.000	1.636.646.453	39,90	48,68	(2.465.028.547)

Tabel 2.9
Anggaran Penerimaan BLUD Berdasarkan Sumber Penerimaan
Semester I Tahun 2025

NO	URAIAN	PAGU TAHUN 2025	REALISASI SEMESTER I TAHUN 2025			LEBIH / (KURANG) (+/-)
			KEUANGAN	%		
				KEU	FISIK	
1	**Pendapatan**	**318.884.600.000**	**172.596.094.376**	**54,12**	**54,12**	**(146.288.505.624)**
2	**Belanja**	**565.175.538.354**	**281.692.961.142**	**49,84**	**64,60**	**(283.482.577.212)**
	- APBD	239.165.938.354	108.263.201.606	45,27	62,25	(130.902.736.748)
	- BLUD	318.884.600.000	166.579.289.536	52,24	55,86	(152.305.310.464)
	- DAK	7.125.000.000	6.850.470.000	96,15	100	(274.530.000)

Yang dimaksud belanja APBD adalah belanja RSUD Kabupaten Tangerang yang sumber dananya berasal dari subsidi APBD dan realisasi anggaran APBD pada semester I Tahun 2025 mencapai 45,27 %.

Belanja BLUD adalah belanja RSUD Kabupaten Tangerang yang sumber dananya berasal dari operasional rumah sakit, menurut basis kas realisasi anggaran BLUD pada semester I Tahun 2025 mencapai 52,24 %.

Belanja DAK adalah belanja RSUD Kabupaten Tangerang yang sumber dananya berasal dari pendapatan APBN dan realisasi anggaran DAK pada semester I Tahun 2025 mencapai 96,15%.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang Semester I Tahun 2025 rata-rata mencapai target dengan indikator sangat baik.

Juga pada kinerja pelayanan rata-rata mencapai target tetapi ada beberapa yang tidak mencapai target dan dapat dijelaskan sebagai berikut :

2.2.1 Kinerja Pelayanan

a. Rawat Jalan

Adanya kenaikan capaian kunjungan Semester I Tahun 2025 sebesar 75.091 target Tahun 2025 yaitu 149.072 capaian persentase 50,63% Tahun 2025, dibandingkan capaian pada Semester I Tahun 2024 sebesar 68.965 target Tahun 2024 139.320 capaian persentase 49,50% tahun 2024. Hal ini disebabkan naik nya jumlah kunjungan pasien dikarenakan di buka jam pelayanan rawat jalan jam 08.00.

b. Klinik Kebidanan

Adanya Kenaikan capaian kunjungan Semester 1 tahun 2025 sebesar 6.131 target Tahun 2025 12.400 capaian persentase 49,44% Tahun 2025 dibandingkan capaian pada Semester 1 Tahun 2024 sebesar 5.661 target Tahun 2024 12.400 capaian persentase 45,65% Tahun 2024. Hal ini disebabkan karena Kualitas pelayanan yang bagus, SDM yang profesional dan Fasilitas yang memadai sehingga masyarakat lebih memilih ke RSUD Kabupaten Tangerang.

c. Rawat Jalan Paviliun Eksekutif Wijayakusuma

Adanya kenaikan capaian kunjungan Semester 1 tahun 2025 sebesar 2.277 target Tahun 2025 5.350 capaian persentase 42,56% Tahun 2025, dibandingkan capaian pada Semester 1 Tahun 2024 sebesar 1.963 target Tahun 2024 5.000 capaian persentase 39,26% Tahun 2024. Dalam upaya untuk peningkatan kunjungan PEW Rawat Jalan, kita harus menggiatkan promosi atau pemasaran yang efektif, tepat sasaran, meningkatkan fasilitas infrastruktur (parkir, ruang tunggu yang nyaman disertai tempat duduk pasien yang memadai), sehingga meningkatkan kenyaman pengunjung.

d. Kemoteraphy

Adanya penurunan capaian kunjungan di Ruangan Kemotherapy Semester 1 Tahun 2025 sebesar 2.399 target Tahun 2025 5.408 capaian persentase 44,36% Tahun 2025, dibandingkan capaian pada Semester 1 Tahun 2024 sebesar 2.405 target Tahun 2024 5.408 capaian persentase 44,47%

Tahun 2024. Hal ini turun nya jumlah kunjungan pasien Kemotherapy di Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang masih pasien lama ada yang sudah meninggal.

e. Thalasemia

Adanya kenaikan capaian kunjungan di Ruangan Thalasemi Semester 1 Tahun 2025 sebesar 10.505 target Tahun 2025 19.504 capaian persentase 53,86% Tahun 2025, dibandingkan capaian pada Semester 1 Tahun 2024 sebesar 9.951 target Tahun 2024 18.228 capaian persentase 54,59% Tahun 2024. Hal ini naik nya jumlah kunjungan pasien Thalasemi di Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang meningkat di Semester 1 pada Tahun 2025.

f. Hemodialisa

Adanya kenaikan capaian kunjungan Semester 1 tahun 2025 sebesar 7.153 target Tahun 2025 12.784 capaian persentase 55,95% Tahun 2025, dibandingkan capaian pada Semester 1 Tahun 2024 sebesar 6.982 target Tahun 2024 11.948 capaian persentase 58,44% Tahun 2024. Hal ini naik nya jumlah kunjungan pasien Hemodialisa di Tahun 2024 menambahnya tempat tidur di hemodialisa.

g. Rawat Inap

Adanya penurunan capaian kunjungan Semester 1 Tahun 2025 sebesar 7.780 target Tahun 2025 16.800 capaian persentase 46,31% Tahun 2025, dibandingkan capaian pada Semester 1 Tahun 2024 sebesar 7.943, target Tahun 2024 18.522 capaian persentase 42,88% Tahun 2024, hal ini karena disebabkan karena adanya Rujukan berjenjang, jadi pasien pasien yang ditangani adalah pasien-pasien yang tidak bisa ditangani oleh Rumah Sakit Type C, Fasilitas infrastruktur yang kurang memadai (Parkir) sehingga mengurangi rasa kenyamanan dalam berobat di RSUD Kabupaten Tangerang.

h. Rawat Inap Kebidanan (+ Perina Bawah dan Rawat Gabung)

Adanya penurunan capaian kunjungan Semester 1 Tahun 2025 sebesar 1.723 target Tahun 2025 3.168 capaian persentase 54,39% Tahun 2025, dibandingkan capaian pada Semester 1 Tahun 2024 sebesar 1.729 target Tahun 2024 4.320 capaian persentase 40,02% Tahun 2024. Hal ini disebabkan karena adanya rujukan berjenjang, sehingga pasien yang ke RSUD Kabupaten Tangerang adalah pasien yang tidak dapat tertangani oleh RS kelas C.

i. Rawat Inap Paviliun Eksekutif Wijaya Kusuma

Adanya Penurunan Capaian kunjungan Rawat Inap Pav. Eksekutif Wijaya Kusuma Semester 1 Tahun 2025 sebesar 312 target Tahun 2025 780 capaian persentase 40,00%

Tahun 2025, dibandingkan capaian Semester 1 Tahun 2024 sebesar 325, target Tahun 2024 yaitu 480, capaian presentase 67,71%. Hal ini disebabkan karena kurangnya promosi atau pemasaran yang tidak Efektif untuk menarik minat masyarakat untuk berobat atau promosi yang tidak tepat sasaran. Fasilitas yang kurang memadai (Parkir), sehingga megurangi rasa nyaman dalam berobat di RSUD Kabupaten Tangerang.

j. ICU

Adanya Kenaikan capaian kunjungan Semester 1 Tahun 2025 sebesar 2.046 target Tahun 2025 yaitu 3.192 capaian persentase 64,10% Tahun 2025, dibandingkan capaian pada Semester 1 Tahun 2024 sebesar 1.319 target Tahun 2024 2.800 capaian persentase 47,11% Tahun 2024. Hal ini disebabkan karena makin bagusnya penilaian dan pemilahan pasien-pasien dari Rawat Inap yang akan dipindahkan ke Ruang ICU, disertai fasilitas yang sudah memadai.

k. Observasi IGD

Adanya kenaikan capaian pasien di Semester 1 Tahun 2025 sebesar 1.380, dibandingkan capaian pada Semester 1 Tahun 2024 sebesar 847. Hal ini disebabkan naik nya jumlah pasien di RSUD Kabupaten Tangerang.

l. IGD Sistemik

Adanya kenaikan capaian kunjungan di Instalasi Gawat Darurat Semester 1 Tahun 2025 sebesar 8.586 target Tahun 2025 16.478 capaian persentase 52,11% Tahun 2025 dibandingkan capaian pada Semester 1 tahun 2024 sebesar 8.770 target Tahun 2024 15.400 capaian persentase 56,95% Tahun 2024. Hal ini naik nya jumlah kunjungan pasien ke IGD di karenakan antusias kepercayaan pasien yang ingin ditangani IGD Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang mulai meningkat.

m. IGD Maternal

Adanya penurunan tidak terlalu banyak capaian kunjungan di IGD Maternal Semester 1 Tahun 2025 sebesar 753 target Tahun 2025 yaitu 1.400 capaian persentase 53,79% Tahun 2025, dibandingkan capaian pada Semester 1 Tahun 2024 sebesar 764 target Tahun 2024 1.718 capaian persentase 44,47% Tahun 2024. Hal ini disebabkan karena adanya rujukan berjenjang, sehingga pasien yang dirujuk ke RSUD Kabupaten Tangerang adalah pasien yang tidak dapat ditangani oleh RS kelas C.

n. Instalasi Kamar Bedah

Adanya kenaikan capaian kunjungan Semester 1 Tahun 2025 sebesar 4.601 target Tahun 2025 yaitu 8.892 capaian

persentase 51,74% Tahun 2025, dibandingkan capaian pada Semester 1 Tahun 2024 sebesar 4.150 target Tahun 2024 9.360 capaian persentase 44,34% Tahun 2024. Hal ini di karenakan Kenaikan jumlah kunjungan Bedah Vaskuler, Orthopedi, Kebidanan, Bedah Plastik dan Mata.

o. Instalasi Pengujian Kesehatan (MCU)

Adanya kenaikan capaian kunjungan Semester 1 Tahun 2025 sebesar 17.760 target Tahun 2025 yaitu 18.535 capaian persentase 186,83% Tahun 2025, dibandingkan capaian pada Semester 1 Tahun 2024 sebesar 5.281 target Tahun 2024 22.000 capaian persentase 24,00% Tahun 2024. Hal ini dikarenakan Tahun 2025 adanya pemeriksaan dalam rangka penerimaan CPNS dan kegiatan lain terkait Pemerintahan.

2.2.2 Kinerja Pelayanan Penunjang Medik

a. Farmasi

Jumlah R/ yang dilayani pada Semester I Tahun 2025 sebesar 1.007.002 mengalami kenaikan dibandingkan Semester I Tahun 2024 sebesar 915.854, hal ini disebabkan karena meningkatnya jumlah pasien yang dilayani depo farmasi seperti kenaikan di depo IGD sebesar 5,73%, Depo OK Cito sebesar 15,95%, dan depo Rawat Inap sebesar 1,09%.

b. Laboratorium

1. Laboratorium Klinik

Jumlah pelayanan Laboratorium klinik pada Semester I Tahun 2025 sebanyak 473.059 meningkat dibandingkan pelayanan pada Semester I yang sama pada Tahun 2024 sebanyak 399.962, hal ini disebabkan adanya pemeriksaan MCU CPNS dan P3K pada bulan Januari dan Februari 2025.

2. Bank Darah

Jumlah pelayanan Bank Darah pada Semester I tahun 2025 sebesar 78.927 mengalami penunan dibandingkan Semester I tahun 2025 sebesar 83.067, hal ini disebabkan penyesuaian panduan praktek klinis dalam penggunaan labu darah baik pasien rawat jalan maupun pasien rawat inap untuk efektivitas dan efisiensi pelayanan.

3. Patologi Anatomi

Jumlah pelayanan patologi anatomi pada Semester I Tahun 2025 sebesar 2.257 meningkat dibandingkan Semester I Tahun 2024 sebesar 2.091 hal ini disebabkan terjadi peningkatan jumlah sampel jaringanyang harus diperiksa baik dari pasien internal RSUD Kab Tangerang maupun pasien eksternal rujukan dari luar RSUD Kabupaten Tangerang.

c. Radiologi dan Diagnostik Elektromedik

Jumlah pelayanan pada Semester I Tahun 2025 sebesar 24.914 meningkat dibandingkan Semester I tahun 2024

sebesar 23.027, hal ini disebabkan meningkatnya jumlah kunjungan pasien CT Scan dan USG dimana pada Semester I terdapat penambahan alat CT Scan yang berasal dari APBD.

d. Rehabilitasi Medik

Jumlah pelayanan pada Semester I Tahun 2024 sebesar 24.629 meningkat dibandingkan pada Semester I Tahun 2023 sebesar 20.613 hal ini disebabkan meningkatnya pelayanan. Terdapat penambahan indikator kinerja baru di Tahun 2024 yaitu waktu tunggu pelayanan (target 25 menit, realisasi 21.72 menit).

e. Pemulasaraan Jenazah

Jumlah pelayanan pada Semester I Tahun 2024 sebesar 24.629 meningkat dibandingkan pada Semester I Tahun 2023 sebesar 20.613 hal ini disebabkan meningkatnya pelayanan. Terdapat penambahan indikator kinerja baru di Tahun 2024 yaitu waktu tunggu pelayanan (target 25 menit, realisasi 21.72 menit).

f. CSSD & Laundry

1. Laundry

Jumlah pelayanan Laundry pada Semester I Tahun 2024 sebesar 140.274 kg menurun dibandingkan Semester I Tahun 2023 sebesar 141.336 hal ini disebabkan pelayanan pasien berkurang karena terdapat beberapa renovasi ruang perawatan.

2. Instrumen & Linen Steril

Jumlah pelayanan Instrumen & Linen Steril Semester I Tahun 2025 sebesar 82.270 paket meningkat dibandingkan Semester I tahun 2025 sebesar 69.948 paket hal ini disebabkan karena pelayanan kamar bedah meningkat dan ada penambahan permintaan sterilisasi dari Rumah Sakit lain.

3. Kassa Steril

Jumlah pelayanan Kasa Steril pada Semester I Tahun 2025 sebesar 90.365 bungkus meningkat dibandingkan pada Semester I Tahun 2024 sebesar 78.776 bungkus, hal ini disebabkan karena peningkatan kegiatan pelayanan kamar bedah.

g. Gizi dan Dietetik

1. Makanan Lengkap Pasien

Jumlah pelayanan makanan lengkap pasien pada Semester I Tahun 2025 sebesar 172.773 porsi menurun dibandingkan Semester I Tahun 2024 sebesar 173.400 porsi hal ini disebabkan terdapat renovasi ruang Aster A dan Aster B serta ada penurunan temapt tidur pasien rawat inap.

2. Makanan Lengkap Karyawan

   Jumlah pelayanan makanan lengkap karyawan pada Semester I Tahun 2025 sebesar 92.207 meningkat dibandingkan Semester I Tahun 2024 sebesar 89.109 hal ini disebabkan terdapat lebih banyak 4 (empat) hari libur di Semester I Tahun 2025 dibandingkan Semester I Tahun 2024 dimana pada saat hari libur karyawan mendapatkan makanan lengkap.

3. Pemberian Snack Dinas Pagi

   Jumlah pelayanan pemberian Snack Semester I Tahun 2025 sebesar 76.380 paket menurun dibandingkan Semester I Tahun 2024 sebesar 77.310 disebabkan terdapat lebih banyak 4 (empat) hari libur di Semester I Tahun 2025 dibandingkan Semester I Tahun 2024 dimana pada saat hari libur karyawan tidak mendapatkan snack dinas pag.

h. Diklat dan Litbang

   Jumlah pelayanan Diklat & Litbang Semester I Tahun 2025 sebesar 7.615 menurun dibandingkan Semester I Tahun 2024 sebesar 8.386 hal ini disebabkan pengurangan kuota mahasiswa institusi sehubungan adanya renovasi ruangan perawatan serta telah diberlakukan tarif diklat yang baru dimana cenderung lebih tinggi dibandingkan rumah sakit lain.

2.2.3 Pendapatan Pelayanan

Pendapatan BLUD pada semester I Tahun 2025 dimana target Pendapatan Rp. 318.884.600.000,- dengan realisasi Rp. 172.596.094.376,- atau sebesar 54.12%, dimana realisasi pendapatan Jasa Pelayanan Umum Rp. 12.518.788.899,- atau mencapai 58,50% dari target Rp. 21.400.000.000,-, pendapatan lainnya Rp. 160.077.305.477,- atau mencapai 53,81% dari target Rp. 297.484.600.000,-.

2.2.4 Biaya BLUD

Penggunaan biaya BLUD pada semester I Tahun 2025 dari target anggaran sebesar Rp. 318.884.600.000,- dengan realisasi Rp. 166.579.289.536,- atau sebesar 52,24%, dimana realisasi belanja pegawai Rp. 36.374.359.599,- atau mencapai 49,81% dari target Rp. 73.026.212.000,-, belanja barang dan jasa Rp. 126.270.385.348,- atau mencapai 52,36% dari target Rp. 241.135.312.675,-, dan belanja Modal Rp. 3.934.544.589,- atau mencapai 83,30% dari target Rp. 4.723.075.325,-.

2.2.5 Anggaran Belanja APBD

Penyerapan anggaran Belanja APBD pada semester I Tahun 2025 sebesar Rp. 108.263.201.606,- dari target Rp. 239.165.938.354,- atau secara keseluruhan mencapai 45,27%.

2.2.6 Anggaran Belanja DAK

Penyerapan anggaran Belanja DAK pada semester I Tahun 2025 sebesar Rp. 6.850.470.000,- dari target Rp. 7.125.000.000,- atau secara keseluruhan mencapai 96,15%.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu-isu penting pada penyelenggaraan tugas dan fungsi RSUD Kabupaten Tangerang antara lain :

1) Kualitas dan kuantitas tenaga medis dan tenaga keperawatan memadai dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan perorangan pada rumah sakit kelas B, namun demikian Rumah sakit masih belum menerapkan secara keseluruhan dalam hal mendahulukan kepentingan pelanggan, kesinambungan dalam memberikan pelayanan, efektifitas, efesiensi dan kenyamanan kepada pasien.
2) Lokasi bangunan yang strategis & mudah dijangkau oleh masyarakat serta peralatan medis lengkap dan memadai namun belum didukung oleh Sistem Informasi Manajemen rumah sakit yang memadai dan area parkir masih belum memenuhi persyaratan sesuai standar.
3) Berkembangnya rumah sakit swasta sebagai kompetitor potensial yang memberikan pelayanan sejenis dan dengan adanya kebijakan pemerintah tentang asuransi kesehatan semesta yang dilaksanakan oleh BPJS yang menjamin seluruh masyarakat di Indonesia bisa mengurangi pangsa pasar jika RSUD Kabupaten Tangerang tidak mampu menyediakan pelayanan yang menyenangkan pelanggan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Perbandingan antara RKPD 2025 dengan rancangan awal usulan RKPD RSUD Kabupaten Tangerang sesuai tabel dapat dilihat pada lampiran 3.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2025 RSUD Kabupaten Tangerang

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

RSUD Kabupaten Tangerang belum melaksanakan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat yang secara langsung menjadi program dan kegiatan pada Tahun 2025.

Tabel 2.10
Realisasi Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator IKU Semester I Tahun 2025

SASARAN		INDIKATOR		SATUAN	TARGET
1	Meningkatkan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	1	Persentase Sumber Daya Kesehatan sesuai standar	Persen	82
		2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap	Angka	85
		3	Jumlah Pasien operasi dan perawatan pasca	Pasien	1
		4	Jumlah pelayanan perinatologi dan NICU yang komprehensif	Laporan	30
		5	Jumlah Pelayanan PONEK	Laporan	3
		6	Persentase Capaian Program Nasional	Persen	90
		7	Jumlah Pemenuhan Sarana Prasarana dan Alkes	Persen	100
		8	Jumlah Penambahan modul IT yang menunjang Pelayanan (Optimalisasi SIMRS)	Persen	70
		9	Persentase Pengembangan Kompetensi SDM	Persen	100
		10	Persentase Capaian Kinerja Administrasi dan Keuangan	Persen	100

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan kesehatan pada hakekatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen Bangsa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.

Pemerintah Kabinet Indonesia Maju telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) bidang Kesehatan Tahun 2020 – 2024 yakni meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta melalui penguatan pelayanan kesehatan dasar (*Primery Health Care*) dengan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif, didukung inovasi dan pemanfaatan teknologi. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) juga telah menetapkan lima fokus strategis pembangunan kesehatan untuk 5 (lima) tahun kedepan, yaitu Kesehatan ibu dan anak, Kesehatan Reproduksi, Perbaikan Gizi Masyarakat, Pencegahan dan Penguatan Sistem Kesehatan serta Pengawasan Obat dan Makanan.

Selain itu, ada empat isu kesehatan yang harus diselesaikan Kemenkes RI saat ini yaitu Stunting, angka kematian ibu dan angka kematian bayi, perbaikan manajemen jaminan kesehatan nasional, penguatan pelayanan kesehatan, obat serta kemandirian obat dan alat kesehatan.

Dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan di Provinsi Banten masih terdapat beberapa permasalahan yang terindentifikasi diantaranya sebagai berikut :

1. Status Kesehatan Masyarakat masih rendah ditandai dengan masih tingginya Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu (AKI);
2. Adanya disparitas kondisi Status Kesehatan, Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan, Sumber Daya Manusia (SDM) kesehatan yang masih lebar antar kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Banten;
3. Angka kejadian kesakitan akibat infeksi penyakit menular langsung maupun melalui binatang masih cukup tinggi, sementara pada saat bersamaan kejadian penyakit degeneratif (Hipertensi, Jantung, Diabetes melitus, dll) mulai meningkat;
4. Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat yang ditandai diantaranya perilaku masyarakat dalam hidup sehat masih rendah, perilaku memberikan ASI ekslusif masih rendah, persalinan di fasilitas kesehatan masih rendah, dll
5. Belum optimalnya pelayanan kesehatan sesuai standar di fasilitas kesehatan dasar maupun rujukan baik dari segi SDM, Sarana dan Prasarana, Peralatan Medik, Sistem Rujukan, dan lain-lain.

Isu Strategis pembangunan kesehatan di Provinsi Banten, yaitu :

1. Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi dan Gizi Buruk Angak Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) masih menjadi masalah di Provinsi Banten (AKI: 308/100.000 KH; AKB; 32/1.000 KH).
2. Angka Kesakitan dan Kematian penyakit menular dan tidak menular.
3. Pengembangan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Provinsi Banten.

Telahaan terhadap kebijakan pembangunan kesehatan baik ditingkat pusat maupun provinsi, merupakan masukan bagi penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang Tahun 2025, dimana baik kebijakan ditingkat pusat, tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten diharapkan memiliki sinergitas yang akurat, sehingga pelaksanaan pembangunan kesehatan di Kabupaten Tangerang dapat menyentuh sasaran yang tepat.

Perlunya peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan disadari bahwa empiris dan penelitian para ahli menunjukkan bahwa pembangunan kesehatan adalah essensial untuk peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Penduduk yang sehat akan menjadi produktif, sehingga dapat meningkatkan pendapatan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja RSUD Kabupaten Tangerang

Pada dokumen RPD Kabupaten Tangerang Tahun 2024 – 2026 disebutkan bahwa tujuan "*Meningkatkan Kualitas Kesehatan*". Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang menetapkan sasaran "Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan". Berdasarkan tujuan diatas maka Dinas Kesehatan kabupaten Tangerang telah merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan kesehatan di Kabupaten Tangerang.

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN	PENGUKURAN INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL KINERJA		TARGET CAPAIAN			KONDISI AKHIR
						2022	2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatkan Kualitas kesehatan		Indeks Kesehatan	Angka yang menunjukkan umur harapan hidup waktu lahir manusia	Angka	0,76	0,77	0,78	0,79	0,8	0,8
		Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Persentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil dibagi jumalh ibu hamil di Kabupaten/Kota x 100%	Persentase	99,74	100	100	100	100	100
			Persentase Ibu Bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan dibagi jumlah ibu bersalin di Kabupaten/Kota x 100%	Persentase	99,92	100	100	100	100	100
			Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah Bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan beyi baru lahir dibagi jumlah bayi baru lahir di Kabupaten/Kota x 100%	Persentase	99,75	100	100	100	100	100
			Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar dibagi jumlah balita di Kabupaten/Kota x 100%	Persentase	99,35	100	100	100	100	100
			Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar dibagi jumlah anak usia pendidikan dasar di	Persentase	97,98	100	100	100	100	100

Dalam Rencana Strategis Bisnis Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2023 – 2028 telah ditetapkan visi dan misi Kabupaten Tangerang disusun selaras dengan tujuan dan sasaran pembangunan pemerintah Kabupaten Tangerang (RPJMD) sebagai berikut:
Visi Kabupaten Tangerang : “Kabupaten Tangerang Berdaya Saing Menuju Masyarakat Madani”.
Untuk mewujudkan visi tersebut maka ditetapkan Misi Kabupaten Tangerang sebagai berikut :

1. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Tangerang yang mandiri, berdayasaing tinggi dan berakhlak mulia.
2. Mewujudkan perekonomian daerah yang maju dan berdaya saing berbasis pada potensi keunggulan lokal.
3. Mewujudkan pelayanan dasar bagi masyarakat secara merata dan proporsional.
4. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, demokratis dan partisipatif.
5. Mewujudkan pembangunan yang terpadu dan serasi dengan pendekatan pemgembangan wilayah berbasis ekonomi dan ekologi.

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang mengacu kepada Misi pertama Kabupaten Tangerang yaitu Mewujudkan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Tangerang yang mandiri, berdayasaing tinggi dan berakhlak mulia, dengan Tujuan, Sasaran dan program yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Bisnis 2024-2028 dan dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan. Didalam Rencana Kerja ditetapkan capaian seluruh indikator sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Dengan dirumuskannya tujuan ini maka Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang telah mengetahui apa yang harus dilaksanakan dan kondisi yang akan dicapai dalam kurun waktu satu tahun.

Sasaran merupakan penjabaran dari masing-masing misi dan tujuan yang telah ditetapkan, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang pada tahun 2025 melalui serangkaian program, kegiata dan sub kegiatan.

Tujuan dan sasaran dalam Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tujuan :
Meningkatkan kualitas kesehatan.

Sasaran:

1. Meningkatnya status kesehatan masyarakat.
2. Terselenggaranya pelayanan jantung terpadu.
3. Terselenggaranya peayanan KIA paripurna.
4. Terselenggaranya pelayanan PONEK.

5. Terselenggaranya program nasional.
6. Meningkatkan pendukung prioritas pengembangan layanan.
7. Terwujudnya IT yang terintegrasi dengan seluruh pelayanan.
8. Terselenggaranya pendidikan, pelatihan dan penelitian di bidang kedokteran dan kesehatan lainnya sesuai dengan rumah sakit kelas B Pendidikan.
9. Meningkatkan kinerj administrasi dan keuangan yang efesien, efektif dan akuntabel.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka diperlukan adanya strategi atau cara pencapaian tujuan yang dipilih secara tepat agar dapat meningkatkan kinerja organisasi. Strategi dan Kebijakan untuk mencapai misi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang adalah sebagai berikut :

TABEL 3.2
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN PROGRAM
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TANGERANG 2025

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	**Meningkatkan Kualitas Kesehatan**	Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat	Peningkatan mutu pelayanan rumah sakit	Peningkatan mutu yang berorientasi pada keselamatan pasien melalui pemenuhan standar akreditasi nasional
				Penguatan kerja sama kelembagaan dan pendidikan
		Terselenggaranya Pelayanan Jantung Terpadu	Pengembangan pelayanan Jantung Terpadu Bedah Jantung Terbuka (CABG)	Penurunan tingkat kematian akibat penyakit jantung dan pembuluh darah
		Terselenggaranya Pelayanan KIA Paripurna	Pengembangan pelayanan Perinatologi dan NICU dengan menambah kapasitas bed NICU 6 menjadi 20 bed	Peningkatan umur harapan hidup bayi baru lahir
		Terselenggaranya Pelayanan Ponek	Meningkatkan fungsi rumah sakit sebagai pusat rujukan pelayanan kesehatan ibu dan bayi bagi sarana pelayanan kesehatan lainnya dengan melengkapi sarana prasarana, sdm terlatih	Penurunan tingkat kematian ibu dan bayi
			Meningkatkan fungsi rumah sakit sebagai model dan Pembina teknis dalam Melaksanakan promosi ASI Eksklusif saat kunjungan antenatal care, intranatal pelaksanaan IMD dan ASI Eksklusif serta Perawatan Metode Kanguru (PMK) pada BBLR	Peningkatan harapan hidup bayi BBLR dan BBSLR
		Terselenggaranya Program Nasional	Melaksanakan pelayanan tuberkulosis dan upaya pengendalian faktor risiko tuberkulosis sesuai peraturan perundang-undangan	Pengintegrasian program nasional (TB MDR dan HIV -AIDS)
			melaksanakan penanggulangan HIV/AIDS sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	1. melaksanakan kebijakan program penanggulangan HIV/AIDS sesuai ketentuan perundangan. 2. telah menerapkan fungsi rujukan HIV/AIDS pada sesuai dengan kebijakan yang berlaku. 3. melaksanakan pelayanan PITC dan PMTC. 4. memberikan pelayanan ODHA dengan faktor risiko IO. 5. melakukan pemantauan dan evaluasi program penanggulangan HIV/AIDS.

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Meningkatkan pendukung prioritas pengembangan layanan	Peningkatan jumlah sarana dan prasarana untuk pelayanan prioritas	Pemenuhan kebutuhan sarana prasarana untuk layanan prioritas
			Peningkatan SDM	Penambahan dan peningkatan kompetensi SDM (nakes dan non nakes)
			Peningkatan jumlah sarana dan prasarana untuk pelayanan prioritas	Pemenuhan kebutuhan sarana prasarana untuk layanan prioritas
		Terwujudnya IT yang terintegrasi dengan seluruh pelayanan	Terintegrasinya SIMRS di semua lini	Pemanfaatan sistem IT untuk semua layanan di RS
		Terselenggaranya pendidikan, pelatihan dan penelitian di bidang kedokteran dan kesehatan lainnya sesuai dengan rumah sakit kelas B Pendidikan	Menyelenggarakan kegiatan pelatihan secara eksternal dan internal	Pemenuhan jumlah jam pelatihan pegawai minimal 20/24 JP per tahun
			Kerja sama dengan institusi lain untuk meningkatkan kompetensi pegawai melalui pendidikan dan pelatihan	MOU dengan institusi lain
			Bekerja sama dengan intstitusi pendidikan dalam kegiatan praktek klinik mahasiswa dan penelitian	Pemenuhan kebutuhan sebagai RS Tipe B Pendidikan
		Meningkatkan kinerja administrasi dan keuangan yang efisien, efektif dan akuntabel	Terintegrasinya pengelolaan administrasi dan keuangan	Pemanfaatan sistem IT untuk mendukung tercapainya akuntabilitas administrasi dan keuangan
			Optimalisasi pengelolaan perencanaan, pelaporan keuangan dan aset	Penggunaan e-BLUD secara optimal
			Efisiensi biaya dengan tidak mempengaruhi kualitas pelayanan dan memaksimalkan fungsi tim kendali mutu dan biaya	Meningkatkan pengendalian biaya melalui koordinasi dan kolaborasi antara manajemen, Manajer Pelayanan Pasien (MPP), instalasi casemix, dan unit-unit terkait
			Peningkatan pendapatan melalui pengembangan pelayanan	Mengembangkan inovasi pelayanan, kerjasama dengan asuransi, dan memaksimalkan fungsi pemasaran

3.3 Program dan Kegiatan

Berdasarkan arah kebijakan pembangunan Tahun 2025 selain melanjutkan dan memantapkan pembangunan kesehatan yang telah dilakukan pada periode RPJMD sebelumnya, pembangunan Tahun 2025 juga memulai pelaksanaan beberapa strategi untuk menyelesaikan permasalahan periode RPJMD sebelumnya. Pada Tahun 2025 sasaran yang menjadi fokus dan strategis yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang adalah “Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat”.

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan adalah :
   1). Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan dengan acuan target secara nasional maupun daerah/Kabupaten.
   2). Pencapaian tujuan RPD Kabupaten Tangerang.

b. Garis besar Rekapitulasi Usulan Program dan Kegiatan Tahun 2025, Jumlah Program yang diusulkan adalah 2 Program, 5 Kegiatan, dan 9 Sub Kegiatan.

c. Sumber Anggaran Tahun 2025
   1). APBD Kabupaten Tangerang
   2). BLUD
   3). DAK

Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan

menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi, sedangkan kegiatan yang selanjutnya disebut kegiatan perangkat daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*Outcome*) suatu program.

Rencana Program dan Kegiatan prioritas daerah Dinas Kesehatan Tahun 2025 berisi program, kegiatan dan sub kegiatan, baik untuk mencapai secara langsung sasaran pembangunan untuk mewujudkan tujuan pembangunan bidang kesehatan jangka menengah maupun untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai kewenangan pemerintah Kabupaten Tangerang. Pagu Indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program dan Kegiatan prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (Pagu Indikatif) selanjutnya dijadikan acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD).

Rencana Kerja berupa Program dan Kegiatan sebagai instrumen pelaksana dari program perangkat daerah Tahun 2025. Penyajian Program dan Kegiatan dilakukan berdasarkan RENSTRA Tahun 2024 – 2026 dan RKPD Tahun 2025 yang sudah ditetapkan. Sasaran Dinas Kesehatan berdasarkan Arah Kebijakan Tahun 2025 dalam RPD adalah meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan dan kualitas kesehatan masyarakat dengan strategis meningkatkan kesadaran dan pemberdayaan masyarakat dalam hidup sehat.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang pada Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 terdapat 2 Program, 5 Kegiatan dan 9 Sub Kegiatan. Secara umum, program, kegiatan dan sub kegiatan RSUD Kabupaten Tangerang pada Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 dapat dilhat pada lampiran 4.a. terlampir.

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang telah menetapkan program prioritas yang dianggap penting baik bersifat strategis maupun operasional. Program tersebut sejalan dengan RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2024 - 2028, dalam hal ini terkait dengan Misi Kedua yaitu Tangerang Tangguh “Meningkatkan akses, mutu dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas dan sehat” dan Misi Keempat yaitu ”Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan dan akuntabel”, dalam mengantisipasi pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Tangerang, Rumah Sakit Umum melaksanakan Program dan Kegiatan, sebagai berikut :

Tabel 3.3
PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2025

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab./Kota

- Pelayanan Gawat Darurat

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target	Program	Kegiatan			Satuan	Target Perubahan 2025
						Uraian	Indikator			
1.	Meningkatkan Kualitas Kesehatan	Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat	Persentase Sumber Daya Kesehatan Sesuai Standar	82%	Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota	Gawat Darurat	Input - Kemampuan Menangani Life Saving di Gawat Darurat		%	100
								- Pemberi pelayanan kegawat-daruratan bersertifikat (ATLS/BTLS/ACLS/GELS/EIMED) yang masih berlaku	%	100
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan rumah sakit	85%				- Ketersediaan tim Penanggulangan bencana	Tim	1
							Proses	- Jam buka pelayanan gawat darurat	Jam	24
								- Waktu tanggap pelayanan dokter di Gawat Darurat	Menit	< 5
								- Tidak adanya keharusan membayar uang muka	%	100
							Output	- Jumlah yang dilayani	Orang	16478
							Outcome	- Kepuasan pasien	%	≥ 75

- Pelayanan Rawat Jalan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target	Program	Kegiatan			Satuan	Target Perubahan 2025
						Uraian	Indikator			
2.	Meningkatkan Kualitas Kesehatan	Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat	Persentase Sumber Daya Kesehatan Sesuai Standar	82%	Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota	Rawat Jalan	Input	- Ketersediaan	%	100
								- Dokter pemberi pelayanan di poliklinik spesialis	%	100
							Proses	- Jam buka pelayanan dengan ketentuan : Senin - kamis (08.00 sd 15.30 wib), Jumat (08.00 sd 16.00 wib)	%	100
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan rumah sakit	85%				- Waktu tunggu rawat jalan	Menit	60
								- Waktu tunggu rekam medis	Menit	
								- Penegakan Diagnosis TB melalui pemeriksaan mikroskopis - yang BTA+	%	100
								- yang BTA+	%	10
								- Pasien Rawat Jalan TB yang ditangani dengan strategis DOTS	%	100
								- Ketersediaan Pelayanan VCT (HIV)	%	100
							Output	- Peresepan obat sesuai formularium	%	99
								- Pencatatan dan Pelaporan TB di RS	%	100
								- **Jumlah Kunjungan**	**orang**	**186768**
								- Rawat Jalan	orang	149072
								- Kemoterapi	orang	5408
								- Hemodialisa	orang	12784
								- Thalasemi	orang	19504
							Outcome	- Kepuasan pasien	%	90

- Pelayanan Rawat Inap

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target	Program	Kegiatan			Satuan	Target Perubahan 2025
						Uraian	Indikator			
3.	Meningkatkan Kualitas Kesehatan	Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat	Persentase Sumber Daya Kesehatan Sesuai Standar	82%	Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota	Rawat Inap	Input	- Ketersediaan	%	100
								- Pemberi Pelayanan	%	100
								- Tempat tidur dengan pengaman	%	100
								- Kamar mandi dengan pengaman pegangan tangan	%	100
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan rumah sakit	85%				- Dokter penanggung jawab pasien rawat inap	%	100
								- Jam Visite Dokter Spesialis (08.00 s/d 14.00 wib)	%	100
								- Kejadian infeksi pasca operasi	%	≤ 1,5
								- Kejadian infeksi nosokomial	%	< 1,5
							Proses	- Tidak adanya kejadian pasien jatuh yang berakibat cacat atau kematian	%	100
								- Pasien rawat inap tuberculosis yang ditangani dengan strategi DOTS	%	100
								- Pencatatan dan pelaporan TB di RS	%	100
							Output	- Kejadian pulang sebelum dinyatakan sembuh	%	< 5
								- Jumlah kunjungan	Kunj	16800
								- BOR	%	75
								- LOS	Hari	4
								- TOI	Hari	≤ 3
								- GDR	‰	< 45
								- NDR	‰	< 25
								- BTO	Kali	50
							Outcome	- Kepuasan pasien	%	90

- Pelayanan Persalinan dan Perinatologi

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target	Program	Kegiatan			Satuan	Target Perubahan 2025
						Uraian	Indikator			
4.	Meningkatkan Kualitas Kesehatan	Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat	Persentase Sumber Daya Kesehatan Sesuai Standar	82%	Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota	Persalinan dan perinatologi	Input	- Pemberi pelayanan persalinan normal :		
								- Dokter	Orang	9
								- Bidan	Orang	24
								- Pemberi pelayanan persalinan dengan penyulit :		
								- Dokter	Orang	1
								- Tim Ponek terlatih	Tim	1
								- Bidan	Orang	2
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan rumah sakit	85%				- Pemberi pelayanan persalinan dengan tindakan operatif		
								- Dokter Sp.OG	Orang	9
								- Dokter Sp.A	Orang	1
								- Sp. An	Orang	1
								- Kemampuan menangani BBLR (1500-2500 gr)	%	100
								- Kemampuan menangani bayi lahir dengan asfiksia	%	100
							Proses	- Pertolongan persalinan melalui seksio caesaria non rujukan	%	< 20
								- Pelayanan kontrasepsi mantap dilakukan oleh SpOG atau SpB atau SpU atau dokter umum terlatih	%	100
								- Konseling peserta KB mantap oleh bidan terlatih	%	100
							Output	- Kunjungan kamar bersalin	Orang	**16968**
								- Kunjungan rawat jalan	Orang	12400
								- Kebidanan (IGDM)	Orang	1400
								- Rawat Inap	Orang	3168
								- Kematian ibu karena persalinan		
								a. CFR Perdarahan	%	< 1
								b. CFR Preeklamsia/eklamsi	%	< 5
								c. CFR Sepsis	%	< 0,2
								- BOR	%	65
								- LOS	Hari	3
								- TOI	Hari	3
								- GDR	‰	< 5
								- NDR	‰	< 2
								- BTO	Kali	50
							Outcome	- Kepuasan pasien	%	80

- Pelayanan Rawat Intensif

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target	Program	Kegiatan			Satuan	Target Perubahan 2025
						Uraian	Indikator			
5.	Meningkatkan Kualitas Kesehatan	Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat	Persentase Sumber Daya Kesehatan Sesuai Standar	82%	Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota	Pelayanan Intensif Unit (ICU)	Input	- Pemberi pelayanan	%	100
								- Ketersediaan fasilitas dan peralatan ruang a. ICU Type B b. ICU Sekunder	%	90
								- Ketersediaan tempat tidur dengan monitoring dan ventilator		1:1;1
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan rumah sakit	85%			Proses	- Kepatuhan terhadap hand hygiene	%	100
								- Kejadian infeksi nosokomial	%	≤ 21
							Output	- Jumlah Kunjungan	orang	2800
								- Pasien yang kembali ke perawatan intensif dengan kasus yang sama < 72 jam	%	≤ 3
								- BOR	%	75
								- LOS	hari	3
								- TOI	hari	2
								- GDR	‰	< 45
								- NDR	‰	< 25
								- BTO	kali	50
							Outcome	- Kepuasan pasien	%	≥ 80

- Pelayanan Kamar Bedah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target	Program	Kegiatan			Satuan	Target Perubahan 2025
						Uraian	Indikator			
6.	Meningkatkan Kualitas Kesehatan	Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat	Persentase Sumber Daya Kesehatan Sesuai Standar	82%	Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota	Pelayanan Kamar Bedah	Input	- Ketersediaan tim	%	90
								- Ketersediaan fasilitas dan peralatan operasi	%	90
								- Kemampuan melakukan tindakan operatif	%	90
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan rumah sakit	85%			Proses	- Waktu tunggu operasi elektif	Hari	< 2
								- Tidak adanya kejadian operasi salah sisi	%	100
								- Tidak adanya kejadian operasi salah orang	%	100
								- Tidak adanya kejadian salah tindakan pada operasi	%	100
								- Tidak adanya kejadian tertinggalnya benda asing/lain pada tubuh pasien seterlah operasi	%	100
								- Komplikasi anestesi karena overdosis, reaksi anestesi, salah penempatan ET	%	≤ 6
							Output	- Jumlah yang dilayani	Tind	8892
								Kejadian kematian di meja operasi	%	≤ 1
							Outcome	- Kepuasan pasien	%	≥ 80

- Pelayanan Pengujian Kesehatan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target	Program	Kegiatan			Satuan	Target Perubahan 2025
						Uraian	Indikator			
7.	Meningkatkan Kualitas Kesehatan	Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat	Persentase Sumber Daya Kesehatan Sesuai Standar	82%	Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota	Pelayanan Pengujian Kesehatan	Input	- Ketersediaan	%	100
								- Dokter pemberi layanan	%	100
							Proses	- Jam buka pelayanan dengan ketentuan	%	100
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan rumah sakit	85%				- Waktu tunggu	Menit	20
							Output	- Jumlah kunjungan	Orang	18535
							Outcome	- Kepuasan pelanggan	%	≥ 80

- Pelayanan Instalasi Wijayakusuma

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target	Program	Kegiatan			Satuan	Target Perubahan 2025
						Uraian	Indikator			
8.	Meningkatkan Kualitas Kesehatan	Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat	Persentase Sumber Daya Kesehatan Sesuai Standar	82%	Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota	Rawat Inap IKW	Input	- Pemberi Pelayanan	%	100
								- Tempat tidur dengan pengaman	%	100
								- Kamar mandi dengan pengaman pegangan tangan	%	100
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan rumah sakit	85%			Proses	- Waktu tunggu rawat jalan	%	≤ 60
								- Dokter penanggung jawab pasien rawat inap	%	100
								- Jam Visite Dokter Spesialis : 08.00 s/d 14.00 wib	%	100
								- Kejadian infeksi pasca operasi	%	≤ 0,5
								- Kejadian infeksi nosokomial	%	< 1,5
								- Tidak adanya kejadian pasien jatuh yang berakibat cacat atau kematian	%	100
								- Pasien rawat inap tuberculosis yang ditangani dengan strategi DOTS	%	100
								- Pencatatan dan pelaporan TB di RS	%	100
							Output	- Jumlah yang dilayani	orang	**6130**
								- Rawat jalan	orang	5350
								- Rawat inap	orang	780
								- Kejadian pulang sebelum dinyatakan sembuh	%	≤ 5
								- BOR	%	70
								- LOS	hari	5
								- TOI	hari	3
								- GDR	‰	45
								- NDR	‰	25
								- BTO	kali	50
							Outcome	- Kepuasan pasien	%	90

- Pelayanan Rekam Medik

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target	Program	Kegiatan			Satuan	Target Perubahan 2025
						Uraian	Indikator			
9.	Meningkatkan Kualitas Kesehatan	Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat	Persentase Sumber Daya Kesehatan Sesuai	82%	Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota	Pelayanan Rekam Medik	Input	- Pemberi pelayanan rekam medis	%	100
							Proses	- Waktu penyediaan dokumen rekam medis rawat jalan	Menit	< 10
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan rumah sakit	85%				- Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat inap	Menit	< 15
							Output	- Kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan	%	100
								- Kelengkapan Informed Concent setelah mendapatkan informasi yang jelas	%	100
							Outcome	- Kepuasan pasien	%	86

- Pelayanan Radiologi

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target	Program	Kegiatan			Satuan	Target Perubahan 2025
						Uraian	Indikator			
10.	Meningkatkan Kualitas Kesehatan	Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat	Persentase Sumber Daya Kesehatan Sesuai Standar	82%	Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota	Pelayanan Radiologi	Input	- Pemberi pelayanan radiologi (radiolog &		
								- Dokter Radiolog	%	100
								- Fisika Medik	%	100
								- Radiografer	%	100
								- Perawat Radiologi	%	100
								- Ketersediaan fasilitas dan peralatan radiografi (sesuai kelas RS)	%	100
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan rumah sakit	85%			Proses	- Waktu tunggu hasil pelayanan foto thorax	Jam	3
								- Kerusakan foto	%	< 1
								- Tidak terjadinya kesalahan pemberian label	%	< 1
							Output	- Jumlah yang dilayani	Orang	50437
								- Pelaksana Ekspertisi hasil pemeriksaan radiologi	%	100
								- Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri	%	90
							Outcome	- Kepuasan pelanggan terhadap pelayanan radiologi	%	90

- Pelayanan Patologi Klinik

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target	Program	Kegiatan			Satuan	Target Perubahan 2025
						Uraian	Indikator			
11.	Meningkatkan Kualitas Kesehatan	Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat	Persentase Sumber Daya Kesehatan Sesuai Standar	82%	Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota	Pelayanan Patologi Klinik	Input	- Pemberi pelayanan laboratorium patologi klinik	%	95
								- Fasilitan dan peralatan	%	85
							Proses	- Waktu tunggu hasil pelayanan	Menit	120
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan rumah sakit	85%				- Tidak adanya kejadian tertukar specimen	%	100
								- Kemampuan memeriksa HIV –	%	100
								- Kemampuan Mikroskopis TB Paru	%	100
							Output	- Jumlah Pemeriksaan	Pem.	809824
								- Ekspertisi hasil pemeriksaan laboratorium	%	75
								- Tidak adanya kesalahan pemberian hasil pemeriksaan laboratorium	%	100
								- Kesesuaian hasil pemeriksaan baku mutu eksternal	%	100
							Outcome	- Kepuasan pelanggan terhadap pelayanan Laboratorium	%	80

- Pelayanan Patologi Anatomi

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target	Program	Kegiatan			Satuan	Target Perubahan 2025
						Uraian	Indikator			
12	Meningkatkan Kualitas Kesehatan	Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat	Persentase Sumber Daya Kesehatan Sesuai Standar	82,50%	Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota	Pelayanan Patologi Anatomi	Input	- Pemberi pelayanan laboratorium patologi klinik	%	90
								- Fasilitan dan peralatan	%	90
							Proses	- Waktu tunggu hasil pelayanan	Hari	5
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan rumah sakit	86%				- Tidak adanya kejadian tertukar specimen	%	100
							Output	- Jumlah Pemeriksaan	Pem.	4325
								- Ekspertisi hasil pemeriksaan laboratorium	%	100
								- Tidak adanya kesalahan pemberian hasil pemeriksaan laboratorium	%	100
								- Kesesuaian hasil pemeriksaan baku mutu eksternal	%	100
							Outcome	- Kepuasan pelanggan terhadap pelayanan Laboratorium	%	≥ 80

- Pelayanan Rehabillitasi Medik

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target	Program	Kegiatan			Satuan	Target Perubahan 2025
						Uraian	Indikator			
13.	Meningkatkan Kualitas Kesehatan	Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat	Persentase Sumber Daya Kesehatan Sesuai Standar	82,50%	Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota	Pelayanan Rehabilitasi Medik	Input	- Pemberi pelayanan rehabilitasi medik	%	100
								- Fasilitas dan Peralatan Rehabilitasi Medik	%	40
							Proses	- Tidak adanya kejadian kesalahan tindakan rehabilitasi medik	%	100
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan rumah sakit	86%			Output	- Jumlah pemeriksaan	Orang	21198
								- Jumlah tindakan	Tindakan	55426
								- Kejadian Drop Out pasien terhadap pelayanan Rehabilitasi Medik yang direncanakan	%	< 50
								- Waktu tunggu pelayanan	Menit	25
							Outcome	- Kepuasan pelanggan rehabilitasi medik	%	≥ 80

- Pelayanan Farmasi

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target	Program	Kegiatan			Satuan	Target Perubahan 2025
						Uraian	Indikator			
14.	Meningkatkan Kualitas Kesehatan	Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat	Persentase Sumber Daya Kesehatan Sesuai Standar	82,50%	Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota	Pelayanan Farmasi	Input	- Pemberi pelayanan farmasi	%	100
								- Fasilitas dan peralatan pelayanan	%	100
								- Ketersediaan formularium (terbaru/updated)	Ada	Ada
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan rumah sakit	86%			Proses	- Waktu tunggu pelayanan obat jadi	Menit	30
								- Waktu tunggu pelayanan obat racikan	Menit	60
							Output	- Jumlah R/ yang dilayani	R/	1920755
								- Pelayanan IV admixture	Dosis	37860
								- Pelayanan Handlying Cytotoxic	Dosis	8321
								- Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian obat	%	100
								- Kepatuhan penggunaan	%	82
							Outcome	- Kepuasan pelanggan farmasi	%	80

- Pelayanan Gizi dan Dietetik

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target	Program	Kegiatan			Satuan	Target Perubahan 2025
						Uraian	Indikator			
15.	Meningkatkan Kualitas Kesehatan	Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat	Persentase Sumber Daya Kesehatan Sesuai Standar	82,50%	Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota	Pelayanan Gizi	Input	- Pemberi layanan gizi	%	100
								- Ketersediaan fasilitas pelayanan gizi	%	100
								- Ketepatan waktu pemberian makanan pada pasien	%	100
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan rumah sakit	86%			Proses	- Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian diet	%	100
							Output	- Sisa makanan yang tidak dimakan oleh pasien	%	< 20
								Jumlah porsi makan	Porsi	357232
							Outcome	- Kepuasan pelanggan Gizi	%	93

- Pelayanan Transfusi Darah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target	Program	Kegiatan		Satuan	Target Perubahan 2025
						Uraian	Indikator		
16.	Meningkatkan Kualitas Kesehatan	Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat	Persentase Sumber Daya Kesehatan Sesuai Standar	82,50%	Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota	Pelayanan Transfusi Darah	Input - Tenaga penyedia pelayanan bank darah rumah sakit	%	100
							- ketersediaan fasilitas dan peralatan bank darah rumah sakit	%	100
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan rumah sakit	86%			Proses - Kejadian reaksi transfuse	%	0,01
							Output - Pemenuhan kebutuhan darah untuk pelayanan transfuse di rumah sakit	%	70
							Outcome - Kepuasan pelayanan transfusi darah	%	≥ 80

- Pelayanan Pasien dengan Jaminan BPJS dan Jaminan Lainnya

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target	Program	Kegiatan		Satuan	Target Perubahan 2025
						Uraian	Indikator		
17	Meningkatkan Kualitas Kesehatan	Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat	Persentase Sumber Daya Kesehatan Sesuai Standar	82,50%	Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota	Pelayanan pasien dengan jaminan BPJS dan jaminan lainnya	Input - Ketersediaan pelayanan untuk keluarga miskin	Ada	Ada
							- Adanya kebijakan rumah sakit untuk pelayanan keluarga miskin	Ada	Ada
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan rumah sakit	86%			Proses - Waktu tunggu verifikasi kepesertaan pasien keluarga miskin	Menit	≤ 15
							- Tidak adanya biaya tambahan yang ditagihkan pada keluarga miskin	Dok	100
							Output - Semua pasien keluarga miskin yang dilayani	Ada	Ada
							Outcome - Kepuasan pelanggan	%	81

- Pelayanan Instalasi Pengolahan Limbah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target	Program	Kegiatan			Satuan	Target Perubahan 2025
						Uraian	Indikator			
18	Meningkatkan Kualitas Kesehatan	Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat	Persentase Sumber Daya Kesehatan Sesuai Standar	82,50%	Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota	Pelayanan Pengolahan Limbah	Input	- Adanya penanggung jawab pengelola limbah rumah sakit	Berkas	Ada SK Direktur sesuai kelas RS menurut PerMenkes No.7 Tahun 2019
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan rumah sakit	86%				- Ketersediaan fasilitas dan peralatan pengelolaan limbah padat, cair di rumah sakit	Berkas	Sesuai dengan persyaratan kelas RS menurut PerMenKes RI No.7/2019 dan persyaratan PerMenLH No.68 Tahun 2016 dan PerMenLHK No. 5 Tahun 2021
							Proses	- Pengelolaan limbah cair	M3	Sesuai dengan persyaratan kelas RS PerMenKes No.7/2019 dan persyaratan PerMenLHK No.68/2016 dan PerMenLHK No. 5/2021
								- Pengelolaan limbah padat medis	Kg	Sesuai dengan persyaratan kelas RS dan persyaratan PerMenKes RI No.7/2019, PerMenLHK No. 56 Tahun 2015 dan No. 6 Tahun 2021
							Output	- Baku mutu limbah cair :		
									Mg/l	a. BOD ≤ 30
									Mg/l	b. COD 100
									Mg/l	c. TSS ≤ 30
									Mg/l	d. pH 6-9
								- Pengelolaan limbah B3 :		
								a. Limbah B3 Medis RS (manifest)	Kg	151000
								b. Limbah padat B3 Non Medis RS	Kg	725
								b. Limbah Cair	M3	103500
								c. Limbah domestik	Kg	860500
								- Pengolahan bank sampah :		
								a. Limbah non infeksi (plabot, jerigen)	Kg	1525
								b. Limbah domestik (kardus, kertas, plastik)	Kg	4925
							Outcome	Terpenuhinya pengolahan limbah padat dan cair sesuai dengan PerMenKes RI No.7/2019	%	100

- Pelayanan Administrasi dan Manajemen

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target	Program	Kegiatan			Satuan	Target Perubahan 2025
						Uraian	Indikator			
19	Meningkatkan Kualitas Kesehatan	Meningkatkan kinerja administrasi dan keuangan yang efisien, efektif dan akuntabel	Persentase Sumber Daya Kesehatan Sesuai Standar	82,50%	Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota	Pelayanan Umum, Administrasi dan Manajemen	Input	- Kelengkapan pangisian jabatan sesuai persyaratan jabatan dalam struktur organisasi	%	100
								- Adanya peraturan internal rumah sakit	Ada	Ada
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan rumah sakit	86%				- Adanya peraturan karyawan rumah sakit	Ada	Ada
								- Adanya daftar urutan kepangkatan karyawan	Ada	Ada
								- Adanya perencanaan strategi bisnis rumah sakit	Ada	Ada
								- Adanya perencanaan pengembangan SDM	Ada	Ada
							Proses	- Tindak lanjut penyelesaian hasil pertemuan direksi	%	100
								- Ketepatan waktu pengusulan kenaikan pangkat	%	100
								- ketepatan waktu pengurusan gaji berkala	%	100
								- Pelaksanaan rencana pengembangan SDM	%	100
								- Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan	%	100
								- Kecepatan waktu pemberian informasi tagihan pasien rawat inap	Jam	≤ 1
							Output	- Cost recovery	%	100
								- Kelengkapan pelaporan akuntabilitas kinerja	%	100
								- Karyawan mendapat pelatihan minimal 20 jam per tahun	%	
								a. Struktural		90
								b. Fungsional		950
								- Ketepatan waktu pemberian insentif sesuai kesepakatan waktu	%	100
							Outcome	- Kepuasan peserta diklat	%	90

- Pelayanan Ambulance dan Mobil Jenazah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target	Program	Kegiatan			Satuan	Target Perubahan 2025
						Uraian	Indikator			
20	Meningkatkan Kualitas Kesehatan	Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat	Persentase Sumber Daya Kesehatan Sesuai Standar	82%	Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota	Pelayanan Ambulance dan Mobil Jenazah	Input	- Ketersediaan pelayanan Mobil Perjalanan mobil Ambulance :	Jam	24
								- Dalam kota	Kali	250
								- Luar Tangerang	Kali	10
								Perjalanan Mobil Jenazah :		
								- Dalam Kota/Tangerang	Kali	400
								- Luar Tangerang	Kali	3
								- Penyedia pelayanan ambulance dan mobil jenazah (supir	%	100
								Perjalanan Mobil Operasional :		
								- Dalam Kota/Tangerang	Kali	450
								- Luar Tangerang	Kali	250
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan rumah sakit	85%			Proses	- Kecepatan memberikan pelayanan		
								- Dalam Kota/Tangerang	Menit	30
								- Luar Tangerang	Jam	6
								- Waktu tanggap pelayanan ambulance kepada masyarakat yang membutuhkan :		
								- Luar Tangerang	Jam	3
							Output	- Tidak terjadinya	%	100
							Outcome	- Kepuasan pelayanan	%	80

- Pelayanan Perawatan Jenazah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target	Program	Kegiatan			Satuan	Target Perubahan 2025
						Uraian	Indikator			
21	Meningkatkan Kualitas Kesehatan	Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat	Persentase Sumber Daya Kesehatan Sesuai Standar	82,50%	Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota	Pelayanan Pemulasaraan Jenazah	Input	- Ketersediaan pelayanan	%	100
								- ketersediaan fasilitas kamar jenazah	Tersedia	Tersedia
								- ketersediaan tenaga di instalasi perawatan jenazah	SK Direktur	Tersedia
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan rumah sakit	86%			Proses	- Waktu tanggap pelayanan pemulasaraan jenazah	%	90
								- Perawatan jenazah sesuai standar universal precaution	%	100
								- Kepatuhan pemberian identifikasi jenazah	%	100
								- Kepatuhan kebersihan tangan	%	100
								- Kepatuhan penggunaan alat	%	100
							Output	- Jumlah	Tindakan	5600
							Outcome	- Kepuasan perawatan jenazah	%	80

- Pelayanan Laundry

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target	Program	Kegiatan			Satuan	Target Perubahan 2025
						Uraian	Indikator			
22	Meningkatkan Kualitas Kesehatan	Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat	Persentase Sumber Daya Kesehatan Sesuai Standar	82,50%	Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota	Pelayanan Laundry	Input	- Ketersediaan pelayanan laundry	Ada	Tersedia
								- Adanya penanggungjawab pelayanan laundry	SK	Tersedia SK direktur
								- Ketersediaan fasilitas dan peralatan laundry	Ada	Tersedia
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan rumah sakit	86%			Proses	- Ketepatan waktu penyedian linen untuk ruang rawat inap dan ruang pelayanan	%	100
								- Ketepatan waktu penyedian alat instrument untuk kamar bedah dan pelayanan rawat inap	%	100
								- Ketepatan pengelolaan linen enfeksius	%	100
								- Kegagalan uji bowidick test	%	0
								- Ketersediaan linen	%	3 set x
								- Linen yang di cuci ulang (rewash)	%	1,8
							Output	- Ketersediaan linen steril untuk kamar operasi	%	100
								- Jumlah pelayanan : Laundry	Kg	288.400
								Instrumen dan linen steril	Paket	131.062
								Kassa Steril	Paket	160.680
							Outcome	Kepatuhan pengamanan alat pelindung diri	%	98

- Pelayanan Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target	Program	Kegiatan			Satuan	Target Perubahan 2025
						Uraian	Indikator			
23	Meningkatkan Kualitas Kesehatan	Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat	Persentase Sumber Daya Kesehatan	82,50%	Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota	Pelayanan Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit	Input	- Adanya penanggung jawab IPSRS	ada	ada
								- Ketersediaan bengkel kerja	Tersedia	Tersedia
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan rumah sakit	86%			Proses	- Waktu tanggap kerusakan atat ≤ 15	%	80
								- Ketepatan waktu pemeliharaan alat sesuai jadwal pemeliharaan	%	100
								- Ketepatan waktu kalibrasi alat	%	100
							Output	- Alat ukur dan alat laboratorium yang dikalibrasi tepat waktu	%	100

- Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target	Program	Kegiatan			Satuan	Target Perubahan 2025
						Uraian	Indikator			
24	Meningkatkan Kualitas Kesehatan	Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat	Persentase Sumber Daya Kesehatan Sesuai Standar	82,50%	Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota	Pencegahan dan pengedalian infeksi	Input	- Adanya anggota tim PPI yang terlatih	%	75
								- Ketersediaan APD disetiap instalasi/departemen	%	75
								- Rencana program PPI	Dok	Ada
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan rumah sakit	86%			Proses	- Pelaksanaan program PPI sesuai rencana	%	100
								- Kepatuhan kebersihan KKP	%	85
								- Penggunaan APD saat melaksanakan tugas	%	100
							Output	- Kegiatan pencatatan dan pelaporan infeksi nosokomial/health care associated infection (HAI) di rumah sakit.	%	100
								- Angka kejadian infeksi nosokomial	%	≤ 1,5
							Outcome	- Tambahan angka kejadian infeksi :		
								- Infeksi daerah operatif (IDO)	%	≤ 2
								- Infeksi saluran kemih (ISK)	‰	4,7
								- Ventilator assosiated pneumonia (VAP)	‰	≤ 5,8
								- Hospital acquared pneumonia (HAP)	‰	≤ 1
								- Infeksi aliran darah primer (IADP)	%	≤ 3,5
								- Dekubitus	%	≤ 2
								- Flebitis	%	≤ 1

- Pelayanan Keamanan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target	Program	Kegiatan			Satuan	Target Perubahan 2025
						Uraian	Indikator			
25	Meningkatkan Kualitas Kesehatan	Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat	Persentase Sumber Daya Kesehatan Sesuai Standar	82,50%	Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota	Pelayanan Keamanan	Input	- Petugas keamanan bersetifikat mempunyai keterangan pernah	Orang	80
								- Sistem pengamanan/protap	Ada	Ada
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan rumah sakit	86%			Proses	- Melakukan patroli/keliling (1 jam sekali sesuai dg kebutuhan)	Jam	2 jam Sekali
								- Evaluasi terhadap sistem keamanan	Triwulan	4
							Output	- Tidak adanya barang milik pasien, pengunjung, karyawan yang hilang	%	100
							Outcome	- Kepuasan pasien	%	90

- Pelayanan Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target	Program	Kegiatan			Satuan	Target Perubahan 2025
						Uraian	Indikator			
26	Meningkatkan Kualitas Kesehatan	Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat	Persentase Sumber Daya Kesehatan Sesuai Standar	82,50%	Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota	Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien	Input	- Adanya anggota tim PMKP yang terlatih	%	80
								- Adanya pedoman PMKP	Dok	1
								- Rencana program PMKP	Dok	1
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan rumah sakit	86%			Proses	- Memantauan indikator mutu berkala		
								- INM	%	70
								- IMP RS	%	70
								- IMP UNIT	%	70
								- SKP	%	70
							Output	- Laporan evaluasi program PMKP berdasarkan STARKES 2022	Dok	1
							Outcome	- Kepuasan pasien terhadap pelayanan RS	%	76,5

- Pelayanan Jantung Vaskuler Terpadu

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target	Program	Kegiatan		Satuan	Target Perubahan 2025
						Uraian	Indikator		
27	Meningkatkan Kualitas Kesehatan	Terselenggaranya Pelayanan Jantung Terpadu	Jumlah Pasien Operasi dan Perawatan Pasca Operasi	2	Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota	Pelayanan Jantung Vaskuler Terpadu	Input - Dokter Spesialis	Orang	4
							- Dokter Spesialis	Orang	4
							- Dokter Spesialis - Bedah Vaskuler	Orang	0
							- Bedah Tumor	Orang	0
							- Dokter Spesialis	Orang	0
							- Dokter Anesthesi	Orang	0
							- Tenaga Perawat	Orang	3
							- Tenaga Teknik Cardiovasculer	Orang	3
							- Tenaga Radiografer	Orang	2
							- Tenaga Farmasi	Orang	1
							Proses - Ketersediaan pelayanan setiap hari pada jam kerja	Jam	7
							Output - Jumlah pelayanan	Pem	9658
							Outcome - Indeks kepuasan masyarakat	%	85

- Pelayanan PONEK

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target	Program	Kegiatan		Satuan	Target Perubahan 2025
						Uraian	Indikator		
28	Meningkatkan Kualitas Kesehatan	Terselenggaranya Pelayanan PONEK	Jumlah Pelayanan PONEK	3	Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota	Pelayanan PONEK	Input - Tim Ponek	%	100
							- Sarana rumah sakit, alat, bangunan dan SDM	%	ada yg belum sesuai
							- adanya SOP	Dok	30
							Proses - AMP (ibu dan bayi)	Kasus	12
							- Waktu tunggu IGD : - Respon time	Menit	< 10
							- Evaluasi untuk diagnostik	Menit	< 15
							- Tindakan awal	Menit	< 30
							- Tindakan definitif	Menit	50
							Output - Poned Terbina (PKM)	%	100
							Kejadian kematian ibu karena (CFR) : a. Perdarahan	%	≤ 1
							b. Preeklamsi/eklamsi (FEB)	%	≤ 30
							c. Sepsis	%	0,2
							- Pertolongan persalinan melalui SC	%	≤ 45
							- Inisiasi Menyusu Dini (IMD)	%	70
							Outcome - Indeks kepuasan masyarakat	%	≥ 80

- Pelayanan Diklat dan Litbang

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target	Program	Kegiatan			Satuan	Target Perubahan 2025
						Uraian	Indikator			
29	Meningkatkan Kualitas Kesehatan	Terselenggaranya pendidikan, pelatihan dan penelitian di bidang kedokteran dan kesehatan lainnya sesuai dengan rumah sakit kelas B Pendidikan	Persentase pengembangan Kompetensi SDM	100%	Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota	Pelayanan diklat dan litbang	Input - Kebijakan / pedoman / panduan prosedur penyelenggaraan diklat dan penelitian		Dok	10
								- Perjanjian kerjasama dengan institusi pendidikan	Dok	20
								- Pembimbing klinik yang kompeten :		
								- Clinical instruktur keperawatan dan tenaga kesehatan	Orang	150
								- Dosen pembimbing klinik (Dodiknis)	Orang	27
								- Ada program pelatihan dan penelitian	Dok	1
							Proses - Penyelenggaraan/pengiriman kegiatan (seminar / bimtek / kursus / workshop)		Orang	300
								- Pelaksanaan bimbingan mahasiswa	Dok	100
								- Jumlah mahasiswa yang praktek di RSU Tangerang	Orang	5000
							Output - Prosentase pegawai yang dilatih minimal 20 jam/tahun			
								- Struktural	Orang	90
								- Fungsional	Orang	950
								- Adanya kegiatan penelitian:		
								- Jumlah penelitian oleh pegawai	Dok	2
								- Penelitian yang dipublikasikan	Dok	1
								- Penelitian oleh institusi lain	Dok	200
							Outcome - Indeks kepuasan peserta diklat		%	80
								- Efektivitas diklat	%	80

Tabel 3.4
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- Kegiatan Perencanaan, Penggangaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target	Program	Uraian			Satuan	Target Perubahan 2025
						Sub kegiatan	Indikator			
1.	Meningkatkan Kualitas Kesehatan	Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat	Persentase Capaian Kinerja Administrasi dan Keuangan	100%	Penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	1.1. Penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Output	- Jumlah dokumen perencanaan perangkat Daerah	Dok	4
							Outcome	- Kepuasan pasien	%	100

- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target	Program	Uraian			Satuan	Target Perubahan 2025
						Sub kegiatan	Indikator			
2.	Meningkatkan Kualitas Kesehatan	Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat	Persentase Capaian Kinerja Administrasi dan Keuangan	100%	Penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	2.1. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Output	- Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang	620
							Outcome	- Kepuasan pasien	%	100

- Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target	Program	Uraian		Satuan	Target Perubahan 2025
						Sub kegiatan	Indikator		
3.	Meningkatkan Kualitas Kesehatan	Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat	Persentase Capaian Kinerja Administrasi dan Keuangan	100%	Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	3.1. Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Output - Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	Unit	56
							Outcome - Kepuasan pasien	%	100

- Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target	Program	Uraian		Satuan	Target Perubahan 2025
						Sub kegiatan	Indikator		
4.	Meningkatkan Kualitas Kesehatan	Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat	Persentase Capaian Kinerja Administrasi dan Keuangan	100%	Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	4.1. Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD	Output - Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	Unit Kerja	1
							Outcome - Kepuasan pasien	%	100

Tabel 3.5
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat

- Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan daerah kabupaten/kota

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target	Program	Uraian		Satuan	Target Perubahan 2025
						Sub kegiatan	Indikator		
5.	Meningkatkan Kualitas Kesehatan	Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat	Persentase Sumber Daya Kesehatan Sesuai Standar	82%	Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	5.1 Pengadaan alat kesehatan / alat penunjang fasilitas kesehatan	Output - Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	Unit	58
							Outcome - Kepuasan pasien	%	100
						5.2 Pengadaan dan pemeliharaan alat kalibrasi	Output - Jumlah penyediaan dan pemeliharaan alat uji dan kalibrasi pada unit pemeliharaan fasilitas kesehatan regional/regional maintainance center	Unit	2177
							Outcome - Kepuasan pasien	%	100
						5.3 Pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan/alat penunjang fasilitas pelayanan kesehatan	Output - Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas Layanan kesehatan yang Terpelihara sesuai standar	Unit	2243
							Outcome - Kepuasan pasien	%	100
						5.4 Pengadaan obat, bahan habis pakai, bahan medis habis pakai, vaksin makanan dan minuman di fasilitas kesehatan	Output - Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Paket	2
							Outcome - Kepuasan pasien	%	100

- Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target	Program	Uraian		Satuan	Target Perubahan 2025
						Sub kegiatan	Indikator		
6.	Meningkatkan Kualitas Kesehatan	Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat	Persentase Sumber Daya Kesehatan Sesuai Standar	82%	Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	6.1 Operasional pelayanan Rumah Sakit	Output - Jumlah dokumen operasional pelayanan Rumah Sakit	Dok	1
							Outcome - Kepuasan pasien	%	100

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DERAH

Rencana Kerja dan Pendanaan Perubahan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang pada Tahun Anggaran 2025 dapat di lihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.1
Rencana Kerja Perubahan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2025

1. Rencana Pendapatan Perubahan pada Tahun 2025

NO	URAIAN	TARGET TAHUN 2025	TARGET PERUBAHAN TAHUN 2025	LEBIH/(KURANG) +/-	%
A.	**Pendapatan Jasa Pelayanan Umum :**	**21.400.000.000**	**23.330.000.000**	**1.930.000.000**	**9,02**
1	Pelayanan Pasien Umum	18.000.000.000	18.000.000.000	-	0
2	Pelayanan Medical Check Up	1.300.000.000	2.630.000.000	1.330.000.000	102,31
3	Pelayanan Diklat	2.000.000.000	2.400.000.000	400.000.000	20
4	Pelayanan Ambulance	100.000.000	300.000.000	200.000.000	200
B.	**Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah :**	**297.484.600.000**	**315.455.000.000**	**17.970.400.000,00**	**6,04**
1	Pelayanan Peserta BPJS	284.342.000.000	299.840.000.000	15.498.000.000	5,45
2	Pelayanan Peserta BPJS Ketenagakerjaan	1.800.000.000	2.000.000.000	200.000.000	11,11
3	Pelayanan Peserta Jamkesda Kabupaten Tangerang	250.000.000	1.000.000.000	750.000.000	300,00
4	Pelayanan Peserta Jamkesda Kota Tangerang	180.000.000	250.000.000	70.000.000	38,89
5	Pelayanan Peserta Jamkesda Bogor	150.000.000	50.000.000	(100.000.000)	(66,67)
6	Pelayanan Pasien Jaminan Jasaraharja	4.000.000.000	4.800.000.000	800.000.000	20,00
7	Pelayanan Pasien Hasil Kerjasama Lainnya	3.120.000.000	3.800.000.000	680.000.000	21,79
8	Parkir	780.000.000	780.000.000	-	0,00
9	Sewa Lahan	267.600.000	560.000.000	292.400.000	109,27
10	Lab Ina Respond	20.000.000	25.000.000	5.000.000	25,00
11	Bunga Bank	2.455.000.000	2.250.000.000	(205.000.000)	(8,35)
12	Lain-lain	120.000.000	100.000.000	(20.000.000)	(16,67)
PENDAPATAN		**318.884.600.000**	**338.785.000.000**	**19.900.400.000**	**6,24**

2. Rencana Perubahan Belanja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang pada Tahun 2025

NO	URAIAN	PAGU TAHUN 2025	PAGU PERUBAHAN TAHUN 2025	LEBIH / (KURANG) (+/-)	%
1	**Pendapatan**	**318.884.600.000**	**338.785.000.000**	**19.900.400.000**	**6,24**
2	**Belanja**	**565.175.538.354**	**695.460.253.924**	**130.284.715.570**	**23,05**
	- APBD	239.165.938.354	235.160.218.555	(4.005.719.799)	(1,67)
	- BLUD	318.884.600.000	453.175.035.369	134.290.435.369	42,11
	- DAK	7.125.000.000	7.125.000.000	-	-

PROGRAM		ANGGARAN	
		Rp	Sumber
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	124.564.420.555	APBD
		453.175.035.369	BLUD
2	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	117.720.798.000	APBD
3	Pelayanan Pendidikan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan	Menjadi bagian dari anggaran Program Peningkatan Pelayanan Umum	BLUD

3. Rencana Perubahan Program dan Kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang pada Perubahan Tahun 2025.

URAIAN	SATUAN	TAHUN ANGGARAN 2025			
		PAGU TAHUN 2025	PAGU PERUBAHAN TAHUN 2025	LEBIH / (KURANG) (+/-)	%
PENDAPATAN		**318.884.600.000**	**338.785.000.000**	**19.900.400.000**	**6,24**
BELANJA		**565.175.538.354**	**695.460.253.924**	**130.284.715.570**	**23,05**
Urusan Pemerintah Bidang Kesehatan					
Progam Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		**451.386.630.554**	**577.739.455.924**	**126.352.825.370**	**27,99**
Kegiatan Perencanaan, Pengganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		**34.670.000**	**37.070.000**	**2.400.000**	**6,92**
- Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	34.670.000	37.070.000	2.400.000	6,92
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**130.382.078.354**	**122.554.758.555**	**(7.827.319.799)**	**(6,00)**
- Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	130.382.078.354	122.554.758.555	(7.827.319.799)	(6,00)
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**2.085.282.200**	**1.972.592.000**	**(112.690.200)**	**(5,40)**
- Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	2.085.282.200	1.972.592.000	(112.690.200)	(5,40)
Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD		**318.884.600.000**	**453.175.035.369**	**134.290.435.369**	**42,11**
- Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Unit Kerja	318.884.600.000	453.175.035.369	134.290.435.369	42,11
Progam Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat		**113.788.907.800**	**117.720.798.000**	**3.931.890.200**	**3,46**
Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		**109.687.232.800**	**113.599.923.000**	**3.912.690.200**	**3,57**
- Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Unit	53.264.869.490	53.264.869.490	-	-
- Sub Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Unit	1.997.383.000	1.366.264.000	(631.119.000)	(31,60)
- Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Unit	2.998.000.000	2.726.266.000	(271.734.000)	(9,06)
- Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Paket	51.426.980.310	56.242.523.510	4.815.543.200	9,36
Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Dokumen**	**4.101.675.000**	**4.120.875.000**	**19.200.000**	**0,47**
- Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Dokumen	4.101.675.000	4.120.875.000	19.200.000	0,47

4. Rencana Kinerja Bidang Pelayanan pada Perubahan Tahun 2025.

No	Bagian	Satuan	Target Tahun 2025	Target Perubahan Tahun 2025	%
1	**Pelayanan Kesehatan perorangan di semua lini pelayanan rumah Sakit**				
a.	**Pelayanan**				
1	**Rawat Jalan**	**Kunj**	**204.518**	**204.518**	**0,00**
	- Inst. R. Jalan	Kunj	149.072	149.072	0,00
	- Klinik Kebidanan	Kunj	12.400	12.400	0,00
	- R. Jalan IKW	Kunj	5.350	5.350	0,00
	- Kemoteraphy	Kunj	5.408	5.408	0,00
	- Thalasemia	Kunj	19.504	19.504	0,00
	- Hemodialisa	Kunj	12.784	12.784	0,00
2	**Rawat Inap**	**Kunj**	**23.940**	**23.940**	**0,00**
	- Inst. R. Inap	Kunj	16.800	16.800	0,00
	- R. Inap Kebidanan + dengan Perina Bawah dan RG	Kunj	3.168	3.168	0,00
	- R. Inap IKW	Kunj	780	780	0,00
	- ICU	Kunj	3.192	3.192	0,00
	- Observasi IGD	Kunj		-	
3	**Gawat Darurat**	**Kunj**	**17.878**	**17.878**	0,00
	- Inst. Gawat Darurat	Kunj	16.478	16.478	0,00
	- Maternal Emergency	Kunj	1.400	1.400	0,00
4	**Kamar Bedah**	**Kunj**	**8.892**	**8.892**	0,00
5	**Medical Check Up**	**Kunj**	**18.535**	**23.828**	0,29

5. Rencana Perubahan Kinerja Bidang Penunjang Medik dan Non Medik pada Tahun 2025.

No	Bagian	Satuan	Target Tahun 2025	Target Perubahan Tahun 2025	%
1	**Pelayanan Kesehatan perorangan di semua lini pelayanan rumah Sakit**				
b.	**Pendukung Pelayanan**				
1	**Farmasi**	**R/**	**1.920.755**	**1.939.963**	**0,01**
2	**Laboratorium :**				
	Laboratorium Klinik	Pel	809.824	809.824	0,00
	Bank Darah	Pel	147.266	147.266	0,00
	Laboratorium Patologi Anatomi	Pel	4.325	4.456	0,03
3	**Radiologi & Diagnostik Elektromedik**	**Pel**	**50.437**	**51.037**	**0,01**
4	**Rehabilitasi Medik**	**Pel**	**55.426**	**55.426**	**0,00**
5	**Pemulasaraan Jenazah**	**Orang**	**5.600**	**5.100**	**(0,09)**
6	**CSSD & Laundry :**				
	- Laundry	Kg	288.400	288.400	0,00
	- Instrumen dan linen steril	Paket	131.062	131.062	0,00
	- Kassa steril	Paket	160.680	160.680	0,00
7	**Gizi dan Dietetik :**				
	- Makanan lengkap pasien	Porsi	357.232	357.232	0,00
	- Makanan lengkap Karyawan	Porsi	176.540	176.540	0,00
	- Pemberian snack	Porsi	184.677	184.677	0,00
8	**Diklat**	**Orang**	**15.754**	**15.754**	**0,00**
9	**Pengelolaan Limbah B3 :**				
	- Limbah B3 Medis RS	Kg	151.000	151.000	0,00
	- Limbah B3 Non Medis RS	Kg	725	725	0,00
	- Limbah B3 Medis RS	M^3	103.500	103.500	0,00
	- Limbah B3 Medis RS	Kg	860.500	860.500	0,00
	Pengelolaan Bank Sampah :				
	- Limbah Non Infeksius	Kg	1.525	1.525	0,00
	- Limbah Domestik	Kg	4.925	4.925	0,00

6. Kinerja Sasaran

Indikator Kinerja Sasaran pada Perubahan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

SASARAN		INDIKATOR		SATUAN	TARGET
1	Meningkatkan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	1	Persentase Sumber Daya Kesehatan sesuai standar	Persen	82
		2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan Rumah Sakit	Angka	85
		3	Jumlah Pasien operasi dan perawatan pasca operasi bedah jantung terbuka	Pasien	1
		4	Jumlah pelayanan perinatologi dan NICU yang komprehensif	Laporan	30
		5	Jumlah Pelayanan PONEK	Laporan	3
		6	Persentase Capaian Program Nasional	Persen	90
		7	Jumlah Pemenuhan Sarana Prasarana dan Alkes	Persen	100
		8	Jumlah Penambahan modul IT yang menunjang Pelayanan (Optimalisasi SIMRS)	Persen	70
		9	Persentase Pengembangan Kompetensi SDM	Persen	100
		10	Persentase Capaian Kinerja Administrasi dan Keuangan	Persen	100

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2025 merupakan Agenda Tahunan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang yang dilaksanakan pada Tahun 2025 dalam kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2024 – 2026. Keberhasilan pembangunan kesehatan tidak semata-mata ditentukan oleh hasil kerja keras sektor kesehatan, tetapi sangat dipengaruhi oleh hasil kerja serta kontribusi positif berbagai sektor pembangunan lainnya. Sebagai uraian penutup dari Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2025 dapat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Penyusunan Rencana Kerja SKPD yang pada hakekatnya merupakan rencana capaian kinerja tahunan ini disusun dengan memperhatikan program dan kegiatan dalam Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang serta mangacu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagaimana nota Kesepakatan antara Pj Bupati Tangerang dengan Pimpinan DPRD Kabupaten Tangerang tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
2. Sesuai dengan RPD Kabupaten Tangerang dan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang Tahun 2024 – 2026 maka ditetapkan Rencana Kerja Tahunan serta kebijakan/strategi untuk mengerahkan segala potensi dan mengurangi keterbatasan/kendala yang ada dalam mencapai tujuan RPD Kabupaten Tangerang.
3. Bahwa Program dan Kegiatan yang tertuang pada Renja Tahun 2025 ini dititik beratkan pada upaya peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang.

Rencana Kerja ini memuat uraian pokok-pokok kebijakan dan indikator-indikator capaian kinerja yang terukur, diharapkan dapat menjadi pedoman dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang.

Demikian Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang semoga dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan program/kegiatan Tahun 2025 pada seluruh unit kerja di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang.

62. Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyusun Rencana Kerja (Renja) yang mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) OPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Renja OPD memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2019 Rumah Sakit Daerah berkedudukan sebagai UOBK (Unit Organisadi Bersifat Ksusus) yang memiliki otonomi dan kewenangan sebagaimana layaknya OPD dalam mengelola sumber daya dalam rangka melaksanakan pelayanan kesehatan.

Rencana Kerja perubahan RSUD Balaraja Kabupaten Tangerang Tahun 2025 merupakan dokumen rencana kerja tahun kedua dari pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang 2025-2029 yang dijabarkan dalam Rencana Kerja dan Rencana Bisnis pedoman pelaksanaan kegiatan dalam periode waktu 1 (satu) tahun.

Fungsi Rencana Kerja perubahan adalah menerjemahkan, mengoperasionalkan rencana strategis OPD/UOBK ke dalam program kegiatan, dan sub kegiatan tahunan UOBK sehingga berkontribusi kepada pencapaian tujuan dan capaian program UOBK secara keseluruhan dan tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam Rencana Strategis OPD/UOBK.

Dengan diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Tangerang No. 074/Kep.268-Huk/2013 tentang Penetapan RSUD Balaraja Kabupaten Tangerang untuk menerapkan PPK-BLUD (Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah) dengan status Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) penuh, dalam pengelolaan (manajemen) dituntut untuk profesional dengan konsep bisnis yang sehat dan bukan semata-mata untuk mencari keuntungan. Fungsi sosial rumah sakit yang menjalankan urusan wajib pemerintah bidang kesehatan tetap dilaksanakan, khususnya pemberian pelayanan kesehatan pada masyarakat dengan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Konsekuensi bagi RSUD Balaraja Kabupaten Tangerang yang menerapkan PPK-BLUD penuh adalah mampu mengelola pendapatan fungsional rumah sakit (pendapatan BLUD RSUD) untuk membiayai kegiatan operasional yang berhubungan langsung dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat/pasien. Untuk itu setiap potensi yang berpeluang menjadi sumber pendapatan harus dikelola dengan optimal. Pengembangan- pengembangan setiap jenis layanan baru sesuai dengan inti bisnis rumah sakit perlu dilakukan terus menerus sepanjang tahun dengan inovasi-inovasi terkini sesuai tujuan, visi dan misi yang telah ditetapkan.

Rencana Kerja perubahan RSUD Balaraja Kabupaten Tangerang Tahun

2025 ini disusun melalui perencanaan yang bersifat bottom-up. Unit-unit layanan sub kegiatan di lingkungan rumah sakit sebagai ujung tombak pelayanan wajib menyusun rencana kegiatan dengan mengembangkan konsep mandiri sehingga kegiatan yang direncanakan disesuaikan dengan prioritas pelayanan dan proyeksi pendapatan yang diperoleh dari masing-masing unit-unit layanan sub kegiatan tersebut. Pimpinan selaku pemegang kebijakan memberikan arahan dalam menentukan program prioritas, kegiatan dan sub kegiatan yang disesuaikan dengan program Pemerintah Kabupaten Tangerang dibidang kesehatan dan dilaksanakan dalam periode waktu 1 (satu) tahun anggaran, yaitu selama Tahun 2025.

1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Kerja RSUD Balaraja Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2025, sejumlah peraturan telah digunakan sebagai dasar, yaitu:

a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
b. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
d. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
e. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 630):
g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
j. Keputusan Menteri Kesehatan No. 228 Tahun 2002 tentang

Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit yang Wajib dilaksanakan Daerah.

k. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2009 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0909);
l. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah kabupaten Tangerang Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0420):
m. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2026 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1116) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2022 nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0222);
n. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang
o. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 16 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) perubahan RSUD Balaraja Kabupaten Tangerang Tahun 2025 dimaksudkan untuk menghasilkan rumusan strategi, arah kebijakan dan program pelayanan rumah sakit secara terarah, efektif, efisien dan terpadu dalam mendorong terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran peningkatan mutu pelayanan Rumah Sakit .

1.3.2 Tujuan

Tujuan disusunnya Rencana Kerja (Renja) perubahan RSUD Balaraja Kabupaten Tangerang Tahun 2025 adalah:

1. Menjabarkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan serta program RSUD Balaraja Kabupaten Tangerang ke dalam arah kebijakan dan program pembangunan yang lebih rinci, terarah, terukur dan dapat dilaksanakan selama Tahun 2025;
2. Untuk meningkatkan koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi peningkatan mutu pelayanan RSUD Balaraja Kabupaten Tangerang
3. Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029 dalam rencana program kegiatan prioritas, pengembangan pelayanan dan pendukung pelayanan kesehatan rumah sakit dalam Tahun Anggaran 2025;
4. Menjadi pedoman bagi pengelola (manajemen) RSUD Balaraja Kabupaten Tangerang dalam melaksanakan seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan rumah sakit pada Tahun Anggaran 2025;

5. Menjadi acuan bagi unit-unit layanan sub kegiatan di RSUD Balaraja Kabupaten Tangerang pada penyusunan Rencana Kerja perubahan dan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) Tahun Anggaran 2025 dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan di rumah sakit sebagai unit pelayanan publik; Menciptakan kepastian dan sinergitas perencanaan program kegiatan pelayanan kesehatan dan rujukan antar sektor maupun program tingkat pemerintah dalam keterpaduan sumber pendanaan;
6. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumber daya serta produktif dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan kesehatan rumah sakit sebagai unit pelayanan publik

1.4. Sistimatika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penyusunan

BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2025
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja perubahan RSUD Balaraja Tahun 2025 dan Capaian Renstra Tahun 2025-2029
- 2.2. Analisisi Kinerja Pelayanan
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PEMBAHASAN RENJA TAHUN 2025
- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB V. PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2025

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas atau pemberi amanah. Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja Kabupaten Tangerang selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja Kabupaten Tangerang yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran srategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang Tahun 2025 - 2029 maupun Rencana Kerja perubahan Tahun 2025 Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

Persentase	Predikat	Kode Warna
< 100%	Tidak Tercapai	Merah
= 100%	Tercapai/ Sesuai Target	Hijau
> 100%	Melebihi Target	Biru

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja Kabupaten Tangerang dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2025 - 2029 maupun Rencana Kerja perubahan Tahun 2025. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja Tahun 2025, hasil reviu dan Indikator Kinerja Utama Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Tangerang Nomor : 75 Tahun 2023 tentang Indikator Kinerja Utama Kabupaten Tangerang Tahun 2025 - 2029 pada Dinas Kesehatan, Adapun indikator Kinerja Utama RSUD Balaraja yang merupakan bagian dari Indikator Utama Dinas Kesehatan adalah Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Rumah Sakit. telah ditetapkan sebanyak 5 sasaran dan sebanyak 48 indikator kinerja (out comes) dengan rincian sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 2 terdiri dari 42 indikator
- Sasaran 3 terdiri dari 2 indikator
- Sasaran 4 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 5 terdiri dari 2 indikator

2.2 Capaian Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja Kabupaten Tangerang telah menetapkan Indikator

Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor 188.4/24.1-RSUD Blj/2015 tanggal 8 Januari 2015 dan melalui Peraturan Bupati Kabupaten Tangerang Nomor : 75 Tahun 2023 tentang Indikator Kinerja Utama Kabupaten Tangerang Tahun 2025 - 2029. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja Kabupaten Tangerang juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja Kabupaten Tangerang tahun 2025 menunjukan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja Utama
Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja
Kabupaten Tangerang Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan RSUD Balaraja	%	82	82,02	100,02
2	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) RSUD Balaraja yang memenuhi standar	%	81	82	101,23
3	Persentase Capaian Indikator Nasional Mutu RSUD Balaraja yang memenuhi standar	%	69,23	70	100,98
4	Persentase Bed Occupancy Rate (BOR) di RSUD Balaraja	%	75,63	71,64	94,72

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut:

Capaian kinerja yang melebih/melampaui target ditunjukan pada indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan RSUD Balaraja dengan capaian 100,02 %.

Capaian kinerja yang melebih/melampaui target atau mencapai 101,23% ditunjukan pada indikator Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) RSUD Balaraja yang melampaui standar, dengan capaian kinerja 82 %.

Capaian kinerja yang melebih/melampaui target 100,98% ditunjukan pada indikator Persentase Capaian Indikator Nasional Mutu RSUD Balaraja yang memenuhi standar, dengan capaian kinerja 96.47%.

Capaian kinerja yang tidak sesuai target 94,72% ditunjukan pada indikator Persentase Bed Occupancy Rate (BOR) di RSUD Balaraja yang tidak memenuhi standar, dengan capaian kinerja 71,64%.

2.3 Pengukuran, Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Secara umum Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja Kabupaten Tangerang telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2025-2029. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029 sebanyak 4 sasaran

Tahun 2024 adalah tahun terakhir pelaksanaan Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja Tahun 2025 - 2029, dari sebanyak

4 sasaran strategis dengan sebanyak 48 indikator kinerja yang ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja Kabupaten Tangerang adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Capaian Indikator Kinerja
Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja Kabupaten Tangerang
Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase karyawan yang memiliki kompetensi yang baik dibidangnya	%	39	39	100.00

2	Akreditasi rumah sakit	Katagori	Lulus madya	Lulus Paripurna	100.00
3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	85	82	96.47
4	Kematian pasien kurang dari 24 jam di gawat darurat	permill	2	6	42.00
5	Ketersediaan pelayanan di Instalasi Rawat Jalan sesuai dengan tipe Rumah Sakit	%	100	100	100.00
6	Tidak adanya kejadian pasien jatuh yag berakibat kecacatan dan kematian di Instalasi Rawat Inap	%	100	100	100.00
7	Kejadian Infeksi pasca operasi (Instalasi Rawat Inap)	%	kurang dari1.5	2	75.00
8	BOR (Bad Ocupancy Rate)	%	60-80	88	110.00
9	AVLOS (Average Lenght Of Stay)	hari	6-9	3.5	130.00
10	TOI (Turn Over Interval)	hari	1-3	0.4	100.00

11	BTO (Bad Turn Over)	Kali	40-50	91	125.00
12	GDR (Gross Death Rate)	permill	kurang dari45	39	100.00
13	NDR (Net Death Rate)	permill	kurang dari25	0.6	100.00
14	Kemampuan menangani BBLR (1500 - 2500 gr) di Unit Kebidanan dan Kandungan serta Perinatologi	%	100	100	100.00
15	Kematian ibu karena persalinan akibat pendarahan (Unit Kebidanan dan Kandungan serta Perinatologi)	%	kurang dari1	0.2	100.00
16	Kematian ibu karena persalinan akibat preeklamsi (Unit Kebidanan dan Kandungan serta Perinatologi)	%	kurang dari30	0	100.00
17	Kematian ibu karena persalinan akibat sepsis (Unit Kebidanan dan Kandungan serta Perinatologi)	%	Kurang dari0.2	0	100.00

18	Tidak adanya kematian di meja operasi (Instalasi Bedah Sentral)	%	100	100	100.00
19	Tidak terjadi operasi salah sisi (Instalasi Bedah Sentral)	%	100	100	100.00
20	Tidak terjadi operasi salah pasien (Instalasi Bedah Sentral)	%	100	100	100.00
21	Tidak adanya kejadian salah tindakan operasi (Instalasi Bedah Sentral)	%	100	100	100.00
22	Pasien yang kembali ke perawatan intensif dengan kasus sama kurang dari 72 jam (Instalasi Care Unit)	%	< 3	0	100.00
23	Tidak terjadinya kesalahan pemberian label (Instalasi Radiologi)	%	100	100	100.00
24	Tidak adanya Kerusakan foto (Instalasi Radiologi)	%	100	100	100.00

25	Tidak adanya kejadian kesalahan pengambilan sampel (Instalasi Laboratorium)	%	100	100	100.00
26	Tidak adanya kesalahan pemberian hasil pemeriksaan laboratorium	%	100	100	100.00
27	Terlaksananya pemberian pelayanan Rehabilitasi Medis	%	100	100	100.00
28	Tidak adanya Kejadian drop out pasien terhadap pelayanan rehabilitasi medik yang direncanakan	%	100	100	100.00
29	Tidak adanya kejadian kesalahan tindakan rehabilitasi medik	%	100	100	100.00
30	Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian obat (Instalasi Farmasi)	%	100	100	100.00
31	Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian diet (Instalasi Gizi)	%	100	98	98.00

32	Tidak adanya kesalahan pemberian darah (Unit Bank Darah RS)	%	100	100	100.00
33	Tidak adanya kesalahan pengisian rekam medik	%	100	100	100.00
34	Baku mutu limbah cair : BOD	%	kurang dari30	17.2	100.00
35	Baku mutu limbah cair : COD	%	kurang dari80	112	71.43
36	Baku mutu limbah cair : TSS	%	kurang dari30	25	100.00
37	Baku mutu limbah cair : PH	Angka	6-9	7.8	100.00
38	Tidak terjadinya keterlambatan dalam penyediaan linen (Instalasi Laundry)	%	100	90	90.00
39	Tidak adanya linen yang hilang (Instalasi Laundry)	%	100	90	90.00
40	Waktu tanggap pelayanan ambulan dan mobil jenazah kurang dari 30 menit	%	100	100	100.00

41	Tidak terjadinya kesalahan identifikasi jenazah (Instalasi Pemulasaran Jenazah)	%	100	100	100.00
42	Waktu tanggap pelayanan kurang dari 15 menit (Instalasi Pemeliharaan Sarana Prasarana RS)	%	100	100	100.00
43	Tidak adanya barang milik pasien, pengunjung, karyawan yang hilang (Pelayanan Keamanan, Kebersihan dan Ketertiban)	%	100	100	100.00
44	Status Rumah sakit : persentase pemenuhan bangunan	%	86	90.5	105.23
45	Status Rumah Sakit : persentase peralatan	%	81	82.3	101.23
46	Terintegrasinya sistem informasi rumah sakit	%	90	90	100.00
47	CRR(Cost Recoveri Rate)	%	70	62	88.57

48	Status Rumah Sakit	Katagori	Kelas B BLUD penuh	Kelas B BLUD Penuh	100.00

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut di atas dapat diperoleh data dan informasi kinerja RSUD Balaraja pada beberapa table berikut :

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Sasaran
Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja Kabupaten Tangerang
Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN
1	Melebihi/Melampaui Target	10.42 %
2	Sesuai Target	72.92 %
3	Tidak Mencapai Target	16.67 %

Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam tabel, sebagai berikut:

Dari sebanyak 5 Sasaran diatas, pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target yang sudah ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 2.4
Pencapaian target Misi

No	Misi	Jumlah Indikator Sasaran	Tingkat Pencapaian					
			Melampaui target		Sesuai Target		Belum Mencapai Target	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Misi 1	1	0	0.00	1	100.00	0	0.00
2	Misi 2	42	3	7.14	32	76.19	7	16.67
3	Misi 3	5	2	40.00	2	40.00	1	20.00
	Jumlah	**48**	**5**	**10.42**	**35**	**72.92**	**8**	**16.67**

Dari sebanyak 5 sasaran dengan sebanyak 48 indikator kinerja, pencapaian kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja Kabupaten Tangerang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.5
Kategori Pencapaian Indikator Sasaran

No	Kategori	Jumlah Indikator	Persentase
A.	**Misi 1**	**1**	
1	Melebihi/Melampaui Target	0	0.00 %
2	Sesuai Target	1	100.00 %
3	Tidak Mencapai Target	0	0.00 %
B.	**Misi 2**	**42**	
1	Melebihi/Melampaui Target	3	7.14 %
2	Sesuai Target	32	76.19 %
3	Tidak Mencapai Target	7	16.67 %
C.	**Misi 3**	**5**	
1	Melebihi/Melampaui Target	2	40.00 %
2	Sesuai Target	2	40.00 %
3	Tidak Mencapai Target	1	20.00 %

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan pembandingan-pembandingan antara lain :

- kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
- kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
- Kinerja nyata dengan target akhir renstra.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja

yang telah dicapai pada tahun 2017 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari sebanyak 5 sasaran dan sebanyak 48 indikator kinerja dari sebanyak 3 Misi, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja Kabupaten Tangerang tahun 2025 - 2029, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

Sasaran **1**	**Terwujudnya kompetensi SDM dalam bidang manajemen, teknis, medis, keperawatan dan *Customer Care***

Sasaran ini terkait dengan Tujuan **"Terwujudnya SDM yang mempunyai *skill, knowledge dan attitude* yang sesuai norma – norma di masyarakat"**
Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian indikator sasaran sebagai berikut :

Tabel 2.6
Analisis Pencapaian Sasaran 1
Terwujudnya kompetensi SDM dalam bidang manajemen, teknis, medis, keperawatan dan costumer care

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		%	Tahun 2023		%	Tahun 2024		%	Tahun 2025		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Persentase karyawan yang memiliki kompetensi yang baik dibidangnya	%	27	30	111	33	33	100	37	32	86.5	39	0	0

Sasaran Terwujudnya kompetensi SDM dalam bidang manajemen, tekhnis, medis, keperawatan dan custumer care dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Persentase karyawan yang memiliki kompetensi yang baik dibidangnya" adalah sebesar 33 dari target sebesar 33 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100.00 %, capaian ini sesuai target yang diperjanjikan.Capaian kinerja nyata indikator 1 "Persentase karyawan yang memiliki kompetensi yang baik dibidangnya" tahun ini menurun 1.19 Point dari capaian tahun sebelumnya yang mencapai 101.19.

Tahun 2025 adalah tahun ke 1 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Persentase karyawan yang memiliki kompetensi yang baik dibidangnya" tahun ini adalah sebesar 100.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja maka capaian kinerjanya mencapai 97.06%.

Faktor-Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian indikator tersebut adalah :

a. ada jenis pelatihan – pelatihan tertentu yang dilakukan secara *In House Training* sehingga peserta pelatihan dapat lebih banyak.
b. RSUD terus melakukan pelatihan-pelatihan untuk mendukung pelayanan yang dilakukan oleh pegawai yang kompetensi di bidangnya Untuk mendukung pencapaian sasaran tersebut dilakukan melalui:

"Program peningkatan pelayanan umum" dengan kegiatan Pendidikan dan pelatihan formal. **Adapun rincian dari kegiatan tersebut adalah :**

NO	NAMA PELATIHAN	JUMLAH PEGAWAI
1	Pelatihan Budaya Kerja	40 Orang
2	Pelatihan para pimpinan dan pokja akreditasi RS dalam penanggulangan bencana	2 Orang
3	Pelatihan Codeblue	40 Orang
4	Pelatihan penanggulangan bencana	50 Orang
5	Dampak kebijakan Nasional terhadap peningkatan mutu dan pemerataan pelayanan kesehatan di RS sesuai UU 23/2014	1 Orang
	Pelatihan penyusunan akuntansi dan laporan keuangan BLUD dengan system	1 Orang
6	Manajemen ruang perawatan	30 Orang
7	Failure mode effect analysis	30 Orang
8	Root Cause Analysis	30 Orang
9	Sosialisasi Gawat Darurat	30 Orang
10	The role of internist in cancer management	1 Orang
11	Plan, Do, Check and Action	1 Orang
12	Workshop pimpinan dan para pimpinan dalam implementasi standar kualifikasi dan pendidikan staf, komunikasi dan informasi serta handling komplai	1 Orang

13	Pelatihan complain handling	1 Orang
14	Pertemuan ilmiah tahuan urology	1 Orang
15	Bimtek pengumpulan data dan analisa data	30 Orang
16	Pelatihan perawatan kritis	30 Orang
17	Pelatihan komunikasi efektif	30 Orang
18	Sosialisasi tranfusi darah	30 Orang
19	Course principles in operative of fraktur management	1 Orang
20	Training of trainers kamar bedah	1 Orang
21	Pelatihan aoutrauma ORP	2 Orang
22	Sosialisasi TB DOTS dan HIV	30 Orang
23	Seminar pendidikan fraud di Jaminan Kesehatan Nasional	1 Orang
24	Pelatihan penanganan kejang pada anak dan dewasa	30 Orang
25	Workshop radiologi Nasional dengan tema aplikasi teleradiologi dalam mewujudkan hasil nilai kritis radiologi sesuai akreditasi dan JCI	2 Orang
26	Workshop the role of clinical pathologist and laboratory	1 Orang
27	Workshop jabatan fungsional dan manajemen pelayanan fisioterapi, pertemuan ilmiah the power of	1 Orang

	you in perioperative nursing dan program pengendalian resistensi antimikroba	
28	Pelatihan cleaning service	1 Orang
29	Workshop pendokumentasian dikamar bedah dan teknik operasi dengan metode laparascopy	2 Orang
30	Pelatihan basic laparascopy for nurse	1 Orang

31	Course principles in operative of fraktur management	1 Orang
32	Diskusi panel kesiapan tenaga koder manghadapi system vedika dan review regulasi terkait pelaksanaan jaminan kesehatan nasional	4 Orang
33	Workshop optimalisasi peran coding untuk klaim RS	1 Orang
34	Pelatihan rekam medis kode penyakit (ICD 10) dan tindakan (ICD 9CM) versi 2010 terkait system vedika dan aplikasi INA CBG's	1 Orang
35	Workshop reconstruction (Urology education)	1 Orang
36	Seminar DPD IPAI	1 Orang
37	Pelatihan ACLS	2 Orang
38	Pelatihan the power of you in perioperative nursing	1 Orang
39	Pelatihan ketrampilan dasar bagi perawat kamar bedah	1 Orang
40	Simposium of anestesia and coesxisiting diseases dan workshop and contiouning professional development (CPD)	2 Orang
41	Pelatihan resusitasi neonatus	4 Orang
42	Workshop pembagian jasa pelayanan rumah sakit dengan methode konversi proporsi	2 Orang
43	Seminar peluang dan tantangan radiographer di era digital radiologi	4 Orang

44	Pelatihan asuhan gizi dan dietetic dan seminar international addressing hospital malnutrition with comprehensive nutrition care in dictetics	2 Orang
45	Bimtek perlindungan hokum tenaga kesehatan pemahaman hokum kedokteran bagi tenaga kesehatan dan manajemen RS	1 Orang
46	Training OHSAS	1 Orang
47	Seminar perekam medis dan informasi kesehatan kredensial perekam medis	4 Orang
48	Pelatihan security	30 Orang
49	Pelatihan PKRS	3 Orang
50	Pelatihan komite keperawatan	2 Orang
	JUMLAH	**284 Orang**

Adapun ***Outcame*** dari Sasaran kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya SDM yang kompeten dibidangnya 33 %

Sasaran 2	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit

Sasaran ini terkait dengan Tujuan **"Terwujudnya pelayanan yang menyenangkan dalam hal produk dan fasilitas pelayanan serta cara memperlakukan pelanggan".**

Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian indikator sasaran sebagai berikut :

Tabel 2.7
Analisis Pencapaian Sasaran 2 Meningkatnya pelayanan kesehatan di rumah sakit

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		%	Tahun 2023		%	Tahun 2024		%	Tahun 2025		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Akreditasi rumah sakit	Katagori	belum ada	belum ada	100	Survey Akreditasi oleh KARS	Survey Akreditasi ole KARS	100	Lulus Perdana	lulus Perdana	100	Lulus madya	Lulus Paripurna	100
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	62	64	103	75	75	100	80	80	100	85	82	96.47

3	Kematian pasien kurang dari 24 jam di gawat darurat	Permill	3.5	2	100	3	3	100	2.5	6.2	40.32	2	6	42.00
4	Ketersediaan pelayanan di Instalasi Rawat Jalan sesuai dengan tipe Rumah Sakit	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5	Tidak adanya	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

	kejadian pasien jatuh yag berakibat kecacatan dan kematian di Instalasi Rawat Inap													
6	Kejadian Infeksi pasca operasi (Instalasi Rawat Inap)	%	< 1,5 %	<1.5	100	<1.5	<1.5	100	<1.5	2.58	58.14	<1.5	2	75.00
7	BOR (Bad Ocupancy rate)	%	60-80	81	100	60-80	83	100	60-80	83	100	60-80	88	110

8	AVLOS (Average Lenght Of Stay)	hari	6-9	2.67	100	6-9	2.9	100	6-9	3.2	100	6-9	3.5	130
9	TOI (Turn Over Interval)	hari	1-3	2.04	100	1-3	1	100	1-3	1.4	100	1-3	0.4	100
10	BTO (Bad Turn Over)	Kali	40-50	72	100	40-50	95	100	40-50	109	100	40-50	91	125
11	GDR (Gross Death Rate)	permill	< 45	29	100	<45	42	100	<45	44	56	<45	39	100
12	NDR (Net Death Rate)	permill	< 25	9	100	< 25	14	100	<25	2.9	0.00	<25	0.6	100
13	Kemampua	%	70	50	71.4	80	100	125	100	100	100	100	100	100

	n menangani BBLR (1500 - 2500 gr) di Unit Kebidanan dan Kandungan serta Perinatologi				3									
14	Kematian ibu karena persalinan akibat pendarahan (Unit Kebidanan dan Kandungan serta Perinatologi)	%	<1	0.13	100	< 1	0.13	100	< 1	0	100.00	< 1	0.2	100

15	Kematian ibu karena persalinan akibat preeklamsi (Unit Kebidanan dan Kandungan serta Perinatologi)	%	< 30	0.25	100	< 30	0.25	100	< 30	0.02	100.00	< 30	0	100
16	Kematian ibu karena persalinan akibat sepsis (Unit Kebidanan dan Kandungan serta Perinatologi)	%	< 0.2	0	100	< 0.2	0	100	< 0.2	0	100	< 0.2	0	100

17	Tidak adanya kematian di meja operasi (Instalasi Bedah Sentral)	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
18	Tidak terjadi operasi salah sisi (Instalasi Bedah Sentral)	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
19	Tidak terjadi operasi salah pasien (Instalasi Bedah Sentral)	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

20	Tidak adanya kejadian salah tindakan operasi (Instalasi Bedah Sentral)	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	100	100	100
21	Pasien yang kembali ke perawatan intensif dengan kasus sama kurang dari 72 jam (Instalasi Care Unit)	%	< 3	0	100	<3	0	100	<3	<3	100.00	<3	0	100

22	Tidak terjadinya kesalahan pemberian label (Instalasi Radiologi)	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
23	Tidak adanya Kerusakan foto (Instalasi Radiologi)	%	100	100	0.00	100	100	100	100	100	100.00	100	100

24	Tidak adanya kejadian kesalahan pengambilan sampel (Instalasi Laboratorium)	%	100	100	0.00	100	100	100	100	100	100.00	100	100	100
25	Tidak adanya kesalahan pemberian hasil pemeriksaan laboratorium	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	100	100	100

26	Terlaksanaya pemberian pelayanan Rehabilitasi Medis	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	100	100	100
27	Tidak adanya Kejadian drop out pasien terhadap pelayanan rehabilitasi medik yang direncanakan	%	100	100	100.00	100	100	100.00	100	100	100.00	100	100	100.00

28	Tidak adanya kejadian kesalahan tindakan rehabilitasi medik	%	100	100	100.00	100	100	100.00	100	100	100	100	100.00
29	Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian obat (Instalasi Farmasi)	%	100	100	100.00	100	100	100.00	100	100	100	100	100.00

30	Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian diet (Instalasi Gizi)	%	100	100	100.00	100	100	100.00	100	100	100.00	100	98	98.00
31	Tidak adanya kesalahan pemberian darah (Unit Bank Darah RS)	%	100	100	100.00	100	100	100.00	100	100	100.00	100	100	100.00
32	Tidak adanya kesalahan pengisian rekam medi	%	100	100	100.00	100	100	100.00	100	100	100.00	100	100	100.00

	k													
33	Baku mutu limbah cair : BOD	%	<30	<30	100	< 30	< 16	100	< 30	23.48	100.00	<30	17.2	100
34	Baku mutu limbah cair : COD	%	< 80	< 80	100	< 80	<80	100	<80	64	100	< 80	112	71.43
35	Baku mutu limbah cair : TSS	%	< 30	<27	100	< 30	< 25	100	< 30	28	100	< 30	25	100
36	Baku mutu limbah cair : PH	Angka	6-9	7	100.00	6-9	7	100	6-9	7.6	100	6-9	7.8	100
37	Tidak terjadinya keterlambatan dalam penyediaan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	90.00	90.00

	linen (Instalasi Laundry)													
38	Tidak adanya linen yang hilang (Instalasi Laundry)	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	100	90	90.00
39	Waktu tanggap pelayanan ambulan dan mobil jenazah kurang dari 30 menit	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	100	100	100
	Tidak terjadinya kesalahan identifi													

40	kasi jenazah (Instalasi Pemulasaran Jenazah)	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	100	100	100
41	Waktu tanggap pelayanan kurang dari 15 Menit (Instalasi Pemeliharaan Sarana Prasarana RS)	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	100	100	100

42	Tidak adanya barang milik pasien, pengunjung, karyawan yang hilang (Pelayanan Keamanan, Kebersihan dan Ketertiban	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	100	100

Sasaran Meningkatnya pelayanan kesehatan di rumah sakit dapat dilihat dari sebanyak 42 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Akreditasi rumah sakit" adalah sebesar Lulus Paripurna dari target sebesar Lulus madya yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100.00 %, capaian ini sesuai target yang diperjanjikan. Tahun 2024 adalah tahun ke 1 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Akreditasi rumah sakit" tahun ini adalah sebesar 100.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja maka capaian kinerjanya mencapai 100.00 %.

Pada Tahun 2022 RSUD Balaraja telah mendapat penilaian Akreditasi Lulus PARIPURNA oleh Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS).

Akreditasi rumah sakit merupakan upaya peningkatan mutu pelayanan rumah sakit yang dilakukan dengan membangun sistem dan budaya mutu. Melalui akreditasi rumah sakit diharapkan ada perbaikan sistem di rumah sakit meliputi input, proses dan produk output (meliputi output dan outcome). Akreditasi ini bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan sehingga sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia yang semakin selektif dan berhak mendapatkan pelayanan yang bermutu.

Akreditasi Rumah Sakit adalah Suatu pengakuan yang diberikan Pemerintah kepada Rumah Sakit karena telah memenuhi standar yang ditentukan. Akreditasi Rumah Sakit versi 2012 terdapat 15 BAB / POKJA , 323 Standar dan 1218 Elemen Penilaian (EP).

Adapun Tujuan Akreditasi adalah :

a) Mempermudah akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.
b) Memberikan perlindungan terhadap keselamatan pasien, masyarakat, lingkungan Rumah Sakit dan SDM Rumah Sakit.
c) Meningkatkan mutu dan mempertahankan standar pelayanan Rumah Sakit.
d) Memberikan kepastian hukum kepada pasien , masyarakat, dan SDM Rumah Sakit.

Manfaat Akreditasi Rumah Sakit :

a) Terbentuknya budaya mutu dalam memberikan pelayanan kesehatan pada pasien sesuai Standar di Rumah Sakit.
b) Terlindunginya pasien/ masyarakat dari layanan kesehatan yang tidak bermutu.
c) Sebagai salah satu syarat peningkatan Kelas Rumah Sakit
d) Sebagai salah satu syarat untu bekerja sama dalam pelayanan BPJS Kesehatan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian Indikator ini adalah sebagai berikut :

1. Komitmen semua Pegawai dalam mewujudkan Rumah Sakit yang terakreditasi Versi 2012.
2. Dukungan dari Pemerintah Daerah Pemerintah Kabupaten Tangerang sangat mendukung pelayanan di Rumah Sakit Daerah Balaraja. Bentuk dukungan yang diberikan dapat dilihat dari penambahan sarana dan prasarana berupa fasilitas gedung rawat inap 4 (empat) lantai yang masih dalam proses pembangunan dan pengadaan alat kesehatan sesuai standar, dan dukungan kebijakan untuk peningkatan mutu layanan di Rumah Sakit.

Untuk mendukung pencapaian sasaran tersebut dilakukan melalui **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan ”** dengan kegiatan:

1) Peningkatan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit
   a. Bimbingan Akreditasi
   b. Penyusunan dokumen akreditasi
   c. Survey simulasi akreditasi
   d. Survey akreditasi

2) Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan
   a. Bimbingan teknis fungsional

Capaian kinerja nyata indikator 2 "Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)" adalah sebesar 82 dari target sebesar 85 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 96.47 %, capaian ini tidak mencapai target yang diperjanjikan. Pencapaian IKM tidak mencapai target disebabkan karena kekurangan ruang rawat inap (belum selesainya bangunan rumah rawat inap), sedangkan yang menyebabkan nilai tinggi adalah karena semua petugas RSUD Balaraja telah kompeten sesuai bidangnya dan RSUD Balaraja dalam memberikan keadilan dalam memberikan pelayanan dan senantiasa meningkatkan pelayanan untuk keselamatan pasien.

Capaian kinerja nyata indikator 2 "Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)" tahun ini menurun 3.53 Point dari capaian tahun sebelumnya yang mencapai 100. Tahun 2022 adalah tahun ke 4 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)" tahun ini adalah sebesar 96.47 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja maka capaian kinerjanya mencapai 96.47 %.

Indeks kepuasan masyarakat adalah gambaran persepsi masyarakat atau kualitas pelayanan kesehatan di RSUD Balaraja sebagai Instansi pelayanan publik. Pelayanan kesehatan merupakan suatu system yang komponennya saling berhubungan, berkaitan dan saling mempengaruhi dalam meningkatkan derajad kesehatan masyarakat sehingga institusi pelayanan publik yang memberikan layanan kesehatan harus dapat mewujudkan pelayanan yang bermutu dan berkualitas dalam memberikan kepuasan pelanggan. Indeks kepuasan terhadap layanan Rumah Sakit yang dicapai merupakan hasil survey kepuasan pelanggan eksternal (Costumer) yang diselenggarakan oleh Tim Rumah Sakit. Untuk mengetahui tingkat kepuasan pelanggan dilakukan survey kepuasan layanan kesehatan di semua unit, dan hasil survey tersebut diolah dan hasilnya merupakan Indeks Kepuasan Masyarakat di RSUD Balaraja.

Pada Tahun 2022, pengukuran IKM dilaksanakan pada unit pelayanan yaitu: Rawat Jalan, Rawat Inap, IGD, Instalasi Farmasi, Laboratorium, Radiologi,Rehabilitasi Medik dan Gizi.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan pencapaian pada indikator ini adalah :

1. Antrian pendaftaran pasien BPJS yang dianggap lama
2. Tempat pendaftran pasien BPJS yang kurang layak
3. Prosedur pelayanan dianggap rumit terutama untuk pasien BPJS karena harus melakukan beberapa tahap dalam menyelesaikan administrasi seperti harus ada rujukan dari Puskesmas atau PPK1
4. Jadwal pelaksanaan pemeriksaan di poliklinik tidak sesuai jadwal, hal ini dikarenakan dokter melakukan visit ke ruang

rawat inap atau sedang melakukan tindakan operasi sehingga waktu dokter datang ke poliklinik tidak sesuai jadwal
5. RSUD Balaraja sedang dalam proses pembangunan sehingga kenyamanan lingkungan terganggu
6. Lahan parkir yang sangat terbatas
7. Jadwal dokter yang kadang tidak tepat waktu
8. Sarana yang dianggap kurang memadai
9. Kurang ramahnya pegawai

Strategi Pemecahan masalah

1. RSUD Balaraja mengembangkan pelayanan berbasis Informasi Teknologi (IT) melalui Website yang dinamakan "Si Jempol" (Sistem Informasi Jaringan Elektronik Medik Pasien On Line), dimana dengan sistem ini Pasien dapat melakukan pendaftaran melalui on line , pasien dapat melihat informasi ketersediaan Tempat Tidur secara real time, dan dapat mengetahui jadwal praktik dokter, untuk mempercepat pelayanan di Instalasi farmasi RSUD Balaraja juga menggunakan Resep secara elektronik. Selain dengan Si Jempol ini Pasien juga dapat melakukan pendaftaran secara mandiri melalui APM (Anjungan Pendaftaran Mandiri)
2. Pada Tahun 2024 RSUD Balaraja mengembangkan layanan aplikasi "Si Jempol" untuk pasien BPJS Kesehatan melalui pemanfaatan jaringan WhatsApp dinamakan "SI AWAK CAGEUR" (Sistem Informasi Aplikasi WhatsApp Cara Andalan Gerai Elektronik Untuk Rakyat). Melalui "SI AWAK CAGEUR" pasien BPJS Kesehatan dapat melakukan booking antrian secara online terutama pasien dengan kondisi tertentu, mengetahui informasi persyaratan BPJS, Informasi Jadwal Praktek Dokter, Informasi Tempat Tidur Online, dan Kritik dan Saran melalui WhatsApp. Layanan ini secara otomatis memberikan pengaturan booking pasien dan informasi layanan rumah sakit.
3. Relokasi tempat pendaftaran BPJS ke lokasi bekas pelayanan poliklinik (Gedung Manajemen)
4. Koordinasi dengan BPJS karena persyaratan tersebut ditetapkan oleh BPJS. Untuk mempercepat proses pendaftaran, RSUD Balaraja telah mengembangkan aplikasi pendaftaran secara Bridging dengan PICARE Puskesmas , sehingga data peserta BPJS dapat terintegrasi langsung dengan sistem IT di RSUD Balaraja
5. Mengatur jadwal visite dokter ke ruang rawat inap sehingga tidak menyita waktu pelayanan di poliklinik
6. Menggunakan tempat parkir di lokasi yang akan dibangun gedung parker
7. Menyediakan audio visual berupa edukasi dan informasi.
8. Perbaikan sarana prasarana
9. Pelatihan service excellent.

Untuk mendukung pencapaian sasaran tersebut dilakukan melalui **Program Peningkatan Pelayanan Umum "** dengan Kegiatan Peningkatan pelayanan promosi kesehatan rumah sakit dengan rincian kegiatan:

a. Terlaksananya Survey Kepuasan Pelanggan
b. Terlaksananya pengadaan sarana promosi dan edukasi RS

c. Terlaksananya Pengadaan Rapat pertemuan PKRS 12 kali
d. Terlaksananya Pengadaan Analisa hasil survey pelanggan 4 kali
e. Terlaksananya Pengadaan Evaluasi komplain *handling* 6 kali
f. Terlaksananya Pengadaan Iklan media cetak

Capaian kinerja nyata indikator 3 "Kematian pasien kurang dari 24 jam di gawat darurat " adalah sebesar 6 dari target sebesar 2 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 42.00 %, capaian ini tidak mencapai target yang diperjanjikan. Capaian kinerja nyata indikator 3 "Kematian pasien kurang dari 24 jam di gawat darurat " tahun ini meningkat 1.68 Point dari capaian tahun sebelumnya yang mencapai 40.32. Tahun 2022 adalah tahun ke 4 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Kematian pasien kurang dari 24 jam di gawat darurat " tahun ini adalah sebesar 42.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja maka capaian kinerjanya mencapai 0.00 %.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan pada indikator, antara lain :

1. Semakin banyaknya kasus-kasus penyakit kronis sub spesialistik yang di rujuk
2. Pasien yang dirujuk ke rumah sakit dalam fase terminal
3. Kurangnya skill tenaga medis dan tenaga perawat
4. Kurangnya alat kesehatan gawat darurat
5. Kurangnya fasilitas pendukung lanjutan (Intensif Care) dan rumah sakit rujukan

Strategi pemecahan masalahnya antara lain :

1. Meningkatkan kemampuan/ skill tenaga medis dan perawat melalui pendidikan dan pelatihan gawat darurat (BTLS, PPD, ATLS, ACLS)
2. Menyediakan alat kesehatan pendukung di IGD
3. Memperbaiki protap tatalaksana pasien di IGD
4. Menambah fasilitas pendukung (Intensif Care)
5. Pembangunan Sarana dan Parasarana Pelayanan Kesehatan di RSUD Balaraja (Gedung dan Alat Kesehatan)
6. Meningkatkan jejaring rujukan lanjutan (rumah sakit sekunder dan tersier)

Capaian kinerja nyata indikator 4 "Ketersediaan pelayanan di Instalasi Rawat Jalan sesuai dengan tipe Rumah Sakit" adalah sebesar 100 dari target sebesar 100 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100.00 %, capaian ini sesuai target yang diperjanjikan. Tahun 2023 adalah tahun ke 5 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Ketersediaan pelayanan di Instalasi Rawat Jalan sesuai dengan tipe Rumah Sakit" tahun ini adalah sebesar 100.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja maka capaian kinerjanya mencapai
100.00 %.

Capaian kinerja nyata indikator 5 "Tidak adanya kejadian pasien jatuh yag berakibat kecacatan dan kematian di Instalasi Rawat Inap" adalah sebesar 100 dari target sebesar 100 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100.00 %, capaian ini sesuai

target yang diperjanjikan. Tahun 2023 adalah tahun ke 5 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Tidak adanya kejadian pasien jatuh yag berakibat kecacatan dan kematian di Instalasi Rawat Inap" tahun ini adalah sebesar 100.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja maka capaian kinerjanya mencapai 100.00 %.

Capaian kinerja nyata indikator 6 "Kejadian Infeksi pasca operasi (Instalasi Rawat Inap)" adalah sebesar 2 dari target sebesar kurang dari
1.5 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 75.00 %, capaian ini tidak mencapai target yang diperjanjikan. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2023 kegiatan pelayanan kamar operasi meningkat sebesar 25%, tidak imbangi dengan penambahan kamar operasi yang hanya berjumlah 4 kamar. Capaian kinerja nyata indikator 6 "Kejadian Infeksi pasca operasi (Instalasi Rawat Inap)" tahun ini meningkat 16.86 Point dari capaian tahun sebelumnya yang mencapai 58.14. Tahun 2017 adalah tahun ke 4 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Kejadian Infeksi pasca operasi (Instalasi Rawat Inap)" tahun ini adalah sebesar 75.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja maka capaian kinerjanya mencapai 0.00 %.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan pada indikator ini, antara lain :

1. Kurangnya fasilitas kamar operasi
2. Belum optimalnya kegiatan pencegahan dan pengendalian infeksi (PPI) di kamar Operasi
3. Kurangnya alat filter ruangan
4. Belum kegiatan maksimalnya uji kuman kamar operasi

Strategi pemecahan masalahnya antara lain :

1. Menambah jumlah kamar operasi
2. Peningkatan kegiatan PPI di kamar operasi
3. Meningkatkan keterampilan dan pengetahuan staf kamar operasi melalui pendiakan dan pelatihan
4. Memperbaiki protap tatalaksana PPI di kamar operasi
5. Menyediakan alat filter ruang operasi
6. Meningkatkan uji kuman kamar operasi secara berkala

Capaian kinerja nyata indikator 7 "BOR (Bad Ocupancy Rate)" adalah sebesar 88 dari target sebesar 60-85 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 110.00 %, capaian ini melebihi target yang diperjanjikan. Capaian kinerja nyata indikator 7 "BOR (Bad Ocupancy Rate)" tahun ini meningkat 10.00 Point dari capaian tahun sebelumnya yang mencapai
100.00 % Tahun 2023 adalah tahun ke 5 renstra, capaian kinerja indikator 1 "BOR (Bad Ocupancy Rate)" tahun ini adalah sebesar 110.00
%, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja maka capaian kinerjanya mencapai 146.67 %.

Capaian kinerja nyata indikator 8 "AVLOS (Average Lenght Of Stay)" adalah sebesar 3.5 dari target sebesar 6-9 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 130.00 %, capaian ini melebihi target yang diperjanjikan. Capaian kinerja nyata indikator 8 "AVLOS (Average Lenght Of Stay)" tahun ini meningkat 30.00 Point dari capaian tahun sebelumnya yang mencapai 100.00%. Tahun 2023 adalah tahun ke 5 renstra, capaian kinerja indikator 1 "AVLOS (Average Lenght Of Stay)" tahun ini adalah sebesar 130.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja maka capaian kinerjanya mencapai 58.33%.

Capaian kinerja nyata indikator 9 "TOI (Turn Over Interval)" adalah sebesar 0.4 dari target sebesar 1-3 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah
100.00 %, capaian ini sesuai target yang diperjanjikan. Tahun 2023 adalah tahun ke 5 renstra, capaian kinerja indikator 1 "TOI (Turn Over Interval)" tahun ini adalah sebesar 100.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja maka capaian kinerjanya mencapai 40.00 %.

Capaian kinerja nyata indikator 10 "BTO (Bad Turn Over)" adalah sebesar 91 dari target sebesar 40-50 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 125.00 %, capaian ini melebihi target yang diperjanjikan. Capaian kinerja nyata indikator 10 "BTO (Bad Turn Over)" tahun ini meningkat 25.00 Point dari capaian tahun sebelumnya yang mencapai
100.00. Tahun 2023 adalah tahun ke 5 renstra, capaian kinerja indikator 1 "BTO (Bad Turn Over)" tahun ini adalah sebesar 125.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja maka capaian kinerjanya mencapai 227.50 %.

Capaian kinerja nyata indikator 11 "GDR (Gross Death Rate)" adalah sebesar 39 dari target sebesar kurang dari45 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100.00 %, capaian ini sesuai target yang diperjanjikan. Capaian kinerja nyata indikator 11 "GDR (Gross Death Rate)" tahun ini meningkat 44.00 Point dari capaian tahun sebelumnya yang mencapai 56.00.Tahun 2023 adalah tahun ke 5 renstra, capaian kinerja indikator 1 "GDR (Gross Death Rate)" tahun ini adalah sebesar
100.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja maka capaian kinerjanya mencapai 0.00 %.

Capaian kinerja nyata indikator 12 "NDR (Net Death Rate)" adalah sebesar 0.6 dari target sebesar kurang dari25 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100.00 %, capaian ini sesuai target yang diperjanjikan. Capaian kinerja nyata indikator 12 "NDR (Net Death Rate)" tahun ini meningkat
100.00 Point dari capaian tahun sebelumnya yang mencapai 0.00. Tahun 2023 adalah tahun ke 5 renstra, capaian kinerja indikator 1 "NDR (Net Death Rate)" tahun ini adalah sebesar 100.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja maka capaian kinerjanya mencapai

0 %.

Capaian kinerja nyata indikator 13 "Kemampuan menangani BBLR (1500 - 2500 gr) di Unit Kebidanan dan Kandungan serta Perinatologi " adalah sebesar 100 dari target sebesar 100 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100.00 %, capaian ini sesuai target yang diperjanjikan. Tahun 2023 adalah tahun ke 5 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Kemampuan menangani BBLR (1500 - 2500 gr) di Unit Kebidanan dan Kandungan serta Perinatologi " tahun ini adalah sebesar 100.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja maka capaian kinerjanya mencapai 100.00 %.

Capaian kinerja nyata indikator 14 "Kematian ibu karena persalinan akibat pendarahan (Unit Kebidanan dan Kandungan serta Perinatologi)" adalah sebesar 0.2 dari target sebesar kurang dari1 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100.00 %, capaian ini sesuai target yang diperjanjikan. Tahun 2023 adalah tahun ke 5 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Kematian ibu karena persalinan akibat pendarahan (Unit Kebidanan dan Kandungan serta Perinatologi)" tahun ini adalah sebesar
100.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja maka capaian kinerjanya mencapai 0.00 %.

Capaian kinerja nyata indikator 15 "Kematian ibu karena persalinan akibat preeklamsi (Unit Kebidanan dan Kandungan serta Perinatologi)" adalah sebesar 0 dari target sebesar kurang dari30 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100.00 %, capaian ini sesuai target yang diperjanjikan. Tahun 2023 adalah tahun ke 5 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Kematian ibu karena persalinan akibat preeklamsi (Unit Kebidanan dan Kandungan serta Perinatologi)" tahun ini adalah sebesar
100.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja maka capaian kinerjanya mencapai 0.00 %.

Capaian kinerja nyata indikator 16 "Kematian ibu karena persalinan akibat sepsis (Unit Kebidanan dan Kandungan serta Perinatologi)" adalah sebesar 0 dari target sebesar kurang dari 0.2 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100.00 %, capaian ini sesuai target yang diperjanjikan. Tahun 2023 adalah tahun ke 5 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Kematian ibu karena persalinan akibat sepsis (Unit Kebidanan dan Kandungan serta Perinatologi)" tahun ini adalah sebesar
100.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja maka capaian kinerjanya mencapai 0.00 %.

Capaian kinerja nyata indikator 17 "Tidak adanya kematian di meja operasi (Instalasi Bedah Sentral) " adalah sebesar 100 dari target sebesar 100 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100.00 %, capaian ini sesuai

target yang diperjanjikan. Tahun 2025 adalah tahun ke 5 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Tidak adanya kematian di meja operasi (Instalasi Bedah Sentral) " tahun ini adalah sebesar 100.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja maka capaian kinerjanya mencapai 100.00 %.

Capaian kinerja nyata indikator 18 "Tidak terjadi operasi salah sisi (Instalasi Bedah Sentral) " adalah sebesar 100 dari target sebesar 100 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100.00 %, capaian ini sesuai target yang diperjanjikan. Tahun 2023 adalah tahun ke 5 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Tidak terjadi operasi salah sisi (Instalasi Bedah Sentral) " tahun ini adalah sebesar 100.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja maka capaian kinerjanya mencapai 100.00 %.

Capaian kinerja nyata indikator 19 "Tidak terjadi operasi salah pasien (Instalasi Bedah Sentral) " adalah sebesar 100 dari target sebesar 100 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100.00 %, capaian ini sesuai target yang diperjanjikan. Tahun 2023 adalah tahun ke 5 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Tidak terjadi operasi salah pasien (Instalasi Bedah Sentral) " tahun ini adalah sebesar 100.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja maka capaian kinerjanya mencapai 100.00 %.

Capaian kinerja nyata indikator 20 "Tidak adanya kejadian salah tindakan operasi (Instalasi Bedah Sentral) " adalah sebesar 100 dari target sebesar 100 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100.00 %, capaian ini sesuai target yang diperjanjikan. Tahun 2023 adalah tahun ke 5 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Tidak adanya kejadian salah tindakan operasi (Instalasi Bedah Sentral)" tahun ini adalah sebesar 100.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja maka capaian kinerjanya mencapai 100%.

Capaian kinerja nyata indikator 21 "Pasien yang kembali ke perawatan intensif dengan kasus sama kurang dari 72 jam (Instalasi Care Unit)" adalah sebesar 0 dari target sebesar kurang dari 3 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100.00 %, capaian ini sesuai target yang diperjanjikan. Tahun 2023 adalah tahun ke 5 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Pasien yang kembali ke perawatan intensif dengan kasus sama kurang dari 72 jam (Instalasi Care Unit)" tahun ini adalah sebesar
0.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja maka capaian kinerjanya mencapai 0.00 %.

Capaian kinerja nyata indikator 22 "Tidak terjadinya kesalahan pemberian label (Instalasi Radiologi) " adalah sebesar 100 dari target sebesar 100 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100.00 %, capaian ini sesuai target yang diperjanjikan. Tahun 2023 adalah tahun ke 5 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Tidak terjadinya kesalahan pemberian label (Instalasi Radiologi) " tahun ini adalah sebesar 100.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja maka

capaian kinerjanya mencapai 100.00 %.

Capaian kinerja nyata indikator 23 "Tidak adanya Kerusakan foto (Instalasi Radiologi) " adalah sebesar 100 dari target sebesar 100 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100.00 %, capaian ini sesuai target yang diperjanjikan. Tahun 2023 adalah tahun ke 5 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Tidak adanya Kerusakan foto (Instalasi Radiologi) " tahun ini adalah sebesar 100.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja maka capaian kinerjanya mencapai 100.00 %.

Capaian kinerja nyata indikator 24 "Tidak adanya kejadian kesalahan pengambilan sampel (Instalasi Laboratorium) " adalah sebesar 100 dari target sebesar 100 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100.00 %, capaian ini sesuai target yang diperjanjikan. Tahun 2023 adalah tahun ke 5 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Tidak adanya kejadian kesalahan pengambilan sampel (Instalasi Laboratorium)" tahun ini adalah sebesar 100.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja maka capaian kinerjanya mencapai 100.00 %.

Capaian kinerja nyata indikator 25 "Tidak adanya kesalahan pemberian hasil pemeriksaan laboratorium " adalah sebesar 100 dari target sebesar 100 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100.00 %, capaian ini sesuai target yang diperjanjikan. Tahun 2023 adalah tahun ke 5 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Tidak adanya kesalahan pemberian hasil pemeriksaan laboratorium " tahun ini adalah sebesar 100.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja maka capaian kinerjanya mencapai 100.00 %.

Untuk mendukung pencapaian sasaran tersebut dilakukan melalui **“Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat”** dengan kegiatan yaitu : PengadaanPenyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pengadaan Bahan Habis Pakai Medis dan Kimia Reagensia.

Capaian kinerja nyata indikator 26 "Terlaksananya pemberian pelayanan Rehabilitasi Medis" adalah sebesar 100 dari target sebesar 100 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100.00 %, capaian ini sesuai target yang diperjanjikan. Tahun 2023 adalah tahun ke 5 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Terlaksananya pemberian pelayanan Rehabilitasi Medis" tahun ini adalah sebesar 100.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja maka capaian kinerjanya mencapai 100.00 %.

Capaian kinerja nyata indikator 27 "Tidak adanya Kejadian drop out pasien terhadap pelayanan rehabilitasi medik yang direncanakan " adalah sebesar 100 dari target 100 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah
100.00 %, capaian ini sesuai target yang diperjanjikan. Tahun 2023 adalah tahun ke 5 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Tidak adanya Kejadian drop out pasien terhadap pelayanan rehabilitasi

medik yang direncanakan" tahun ini adalah sebesar 100.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja maka capaian kinerjanya mencapai 0.00 %.

Capaian kinerja nyata indikator 28 "Tidak adanya kejadian kesalahan tindakan rehabilitasi medik" adalah sebesar 100 dari target sebesar 100 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100.00 %, capaian ini sesuai target yang diperjanjikan. Tahun 2023 adalah tahun ke 5 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Tidak adanya kejadian kesalahan tindakan rehabilitasi medik" tahun ini adalah sebesar 100.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja maka capaian kinerjanya mencapai 100.00 %.

Capaian kinerja nyata indikator 29 "Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian obat (Instalasi Farmasi) " adalah sebesar 100 dari target sebesar 100 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100.00 %, capaian ini sesuai target yang diperjanjikan. Tahun 2023 adalah tahun ke 5 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian obat (Instalasi Farmasi) " tahun ini adalah sebesar 100.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja maka capaian kinerjanya mencapai 100.00 %.

Untuk mendukung pencapaian sasaran tersebut dilakukan melalui "**Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat"** dengan kegiatan yaitu : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pengadaan Obat.

Capaian kinerja nyata indikator 30 "Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian diet (Instalasi Gizi) " adalah sebesar 98 dari target sebesar 100 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 98.00 %, capaian ini tidak mencapai target yang diperjanjikan. Capaian kinerja nyata indikator 30 "Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian diet (Instalasi Gizi) " tahun ini menurun 2.00 Point dari capaian tahun sebelumnya yang mencapai 100.00. Tahun 2023 adalah tahun ke 5 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian diet (Instalasi Gizi) " tahun ini adalah sebesar 98.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja maka capaian kinerjanya mencapai 98.00 %.

Untuk mendukung pencapaian sasaran tersebut dilakukan melalui "**Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat"** dengan kegiatan yaitu Operasional Pelayanan Rumah Sakit

1. Penyediaan Makanan dan Minuman Pasien Rumah Sakit.
   a. Tersedianya makanan dan minuman pasien 12 bulan
2. Penyediaan Makanan dan Minuman Petugas jaga Rumah Sakit.
   a. Tersedianya makanan dan minuman petugas jaga RS 365 hari
3. Pelaksanaan screening dan konsultasi gizi

Capaian kinerja nyata indikator 31 "Tidak adanya kesalahan pemberian darah (Unit Bank Darah RS) " adalah sebesar 100 dari target sebesar 100 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100.00%, capaian ini sesuai target yang diperjanjikan. Tahun 2022 adalah tahun ke 5 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Tidak adanya kesalahan pemberian darah (Unit Bank Darah RS) " tahun ini adalah sebesar 100.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja maka capaian kinerjanya mencapai 100.00 %.

Capaian kinerja nyata indikator 32 "Tidak adanya kesalahan pengisian rekam medik " adalah sebesar 100 dari target sebesar 100 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100.00 %, capaian ini sesuai target yang diperjanjikan. Tahun 2023 adalah tahun ke 5 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Tidak adanya kesalahan pengisian rekam medik " tahun ini adalah sebesar 100.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja maka capaian kinerjanya mencapai 100.00 %.

Capaian kinerja nyata indikator 33 "Baku mutu limbah cair : BOD" adalah sebesar 17.2 dari target sebesar kurang dari 30 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100.00 %, capaian ini sesuai target yang diperjanjikan. Tahun 2023 adalah tahun ke 5 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Baku mutu limbah cair : BOD tahun ini adalah sebesar
100.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja maka capaian kinerjanya mencapai 0.00 %.

Capaian kinerja nyata indikator 34 "Baku mutu limbah cair : COD" adalah sebesar 112 dari target sebesar kurang dari 80 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 71.43 %, capaian ini tidak mencapai target yang diperjanjikan. Capaian kinerja nyata indikator 34 "Baku mutu limbah cair : COD" tahun ini menurun 28.57 Point dari capaian tahun sebelumnya yang mencapai 100.00. Tahun 2023 adalah tahun ke 5 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Baku mutu limbah cair : COD" tahun ini adalah sebesar 71.43 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja maka capaian kinerjanya mencapai 0.00%.

Capaian kinerja nyata indikator 35 "Baku mutu limbah cair : TSS" adalah sebesar 25 dari target sebesar kurang dari 30 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100.00 %, capaian ini sesuai target yang diperjanjikan. Tahun 2023 adalah tahun ke 5 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Baku mutu limbah cair : TSS" tahun ini adalah sebesar
100.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja maka capaian kinerjanya mencapai 0.00 %.

Capaian kinerja nyata indikator 36 "Baku mutu limbah cair : PH" adalah sebesar 7.8 dari target sebesar 6-9 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100.00 %, capaian ini sesuai target yang

diperjanjikan. Tahun 2023 adalah tahun ke 5 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Baku mutu limbah cair : PH" tahun ini adalah sebesar 100.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja maka capaian kinerjanya mencapai 130.00 %.

Untuk mendukung pencapaian sasaran tersebut dilakukan melalui "**Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat"** dengan kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Rumah Sakit yang tertuang dalam RBA BLUD yaitu:

1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit
   a) Pemeliharaan Instalasi Air dan IPAL *(Instalasi Pengolahan Air Limbah)*
   b) Pemeliharaan Konstruksi Jaringan Air
   c) Pemeliharaan bak/tangki rektor IPAL
   d) Pemanfaatan air rijek buangan RO *(Reverse Osmosis)*
   e) Pemeliharaan Sanitasi Dasar
      1. Pemeriksaan udara ruang 1 tahun 1 x
      2. Pemeriksaan usap alat 1 tahun
      3. Pemeriksaan air limbah 1 tahun 4 kali
      4. Pemeriksaan air bersih 1 tahun 2 kali
      5. Pemeriksaan sampel makanan 1 tahun 2 kali
      6. Pengadaan botol sampel habis pakai 50 buah
   f) Pembuangan sampah non medis 144 kali
   g) Pembuangan sampah medis 18.180 kg
   h) Pemeliharaan Barang Bengkel IPRS 1 paket
   i) Pengadaan safety box 340 buah
   j) Pembelian Bakteri Pengurai 50 liter
   k) Pemeliharaan Mesin dan jaringan pipa IPAL

Capaian kinerja nyata indikator 37 "Tidak terjadinya keterlambatan dalam penyediaan linen (Instalasi Laundry) " adalah sebesar 90 dari target sebesar 100 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 90.00 %, capaian ini tidak mencapai target yang diperjanjikan. Capaian kinerja nyata indikator 37 "Tidak terjadinya keterlambatan dalam penyediaan linen (Instalasi Laundry) " tahun ini menurun 10.00 Point dari capaian tahun sebelumnya yang mencapai 100.00. Tahun 2023 adalah tahun ke 5 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Tidak terjadinya keterlambatan dalam penyediaan linen (Instalasi Laundry) " tahun ini adalah sebesar 90.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja maka capaian kinerjanya mencapai 90.00 %.

Untuk mendukung pencapaian sasaran tersebut dilakukan melalui "**Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat"** dengan kegiatan dengan kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Rumah Sakit**"** yang tertuang dalam RBA BLUD yaitu:

1. Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dll)
   - Terlaksananya Pengadaan linen rumah sakit

- Terlaksanaya pengadaan jasa laundry sebanyak

Capaian kinerja nyata indikator 38 "Tidak adanya linen yang hilang (Instalasi Laundry)" adalah sebesar 90 dari target sebesar 100 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 90.00 %, capaian ini tidak mencapai target yang diperjanjikan. Capaian kinerja nyata indikator 38 "Tidak adanya linen yang hilang (Instalasi Laundry)" tahun ini menurun 10.00 Point dari capaian tahun sebelumnya yang mencapai 100.00. Tahun 2023 adalah tahun ke 5 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Tidak adanya linen yang hilang (Instalasi Laundry)" tahun ini adalah sebesar 90.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja maka capaian kinerjanya mencapai 90.00%.

Capaian kinerja nyata indikator 39 "Waktu tanggap pelayanan ambulan dan mobil jenazah kurang dari 30 menit" adalah sebesar 100 dari target sebesar 100 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100.00 %, capaian ini sesuai target yang diperjanjikan. Tahun 2023 adalah tahun ke 5 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Waktu tanggap pelayanan ambulan dan mobil jenazah kurang dari 30 menit" tahun ini adalah sebesar 100.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja maka capaian kinerjanya mencapai 100.00 %.

Capaian kinerja nyata indikator 40 "Tidak terjadinya kesalahan identifikasi jenazah (Instalasi Pemulasaran Jenazah)" adalah sebesar 100 dari target sebesar 100 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100.00 %, capaian ini sesuai target yang diperjanjikan. Tahun 2023 adalah tahun ke 5 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Tidak terjadinya kesalahan identifikasi jenazah (Instalasi Pemulasaran Jenazah)" tahun ini adalah sebesar 100.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja maka capaian kinerjanya mencapai 100.00 %.

Capaian kinerja nyata indikator 41 "Waktu tanggap pelayanan kurang dari 15 menit (Instalasi Pemeliharaan Sarana Prasarana RS)" adalah sebesar 100 dari target sebesar 100 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100.00 %, capaian ini sesuai target yang diperjanjikan. Tahun 2023 adalah tahun ke 5 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Waktu tanggap pelayanan kurang dari 15 menit (Instalasi Pemeliharaan Sarana Prasarana RS)" tahun ini adalah sebesar 100.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja maka capaian kinerjanya mencapai 100.00 %.

Untuk mendukung pencapaian sasaran tersebut dilakukan melalui "**Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat"** dengan kegiatan dengan kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah

Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Rumah Sakit**”** yang tertuang dalam RBA BLUD yaitu dengan sub kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor.

Capaian kinerja nyata indikator 42 "Tidak adanya barang milik pasien, pengunjung, karyawan yang hilang (Pelayanan Keamanan, Kebersihan dan Ketertiban) " adalah sebesar 100 dari target sebesar 100 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100.00 %, capaian ini sesuai target yang diperjanjikan. Tahun 2023 adalah tahun ke 5 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Tidak adanya barang milik pasien, pengunjung, karyawan yang hilang (Pelayanan Keamanan, Kebersihan dan Ketertiban) " tahun ini adalah sebesar 100.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja maka capaian kinerjanya mencapai 100.00 %.

Untuk mendukung pencapaian sasaran tersebut dilakukan melalui “**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota”** dengan kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

Sasaran 3	**Meningkatnya Standar pemenuhan sarana prasarana rumah sakit tipe B**

Sasaran ini terkait dengan Tujuan **“Tersedianya bangunan yang enak dilihat, bersih, menarik, nyaman, serta peralatan yang lengkap dengan mengikuti perkembangan teknologi ”.**
Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian indikator sasaran sebagai berikut :

Tabel 2.8
Analisis Pencapaian Sasaran 3
Meningkatnya standar pemenuhan sarana prasarana rumah sakit tipe B

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		%	Tahun 2023		%	Tahun 2024		%	Tahun 2025		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Status Rumah sakit: persentase pemenuhan bangunan	%	70	53	76	77	60	78	81	81	100	86	90.5	105.23
2	Status Rumah Sakit: persentase peralatan	%	47	61	130	70	60	86	77	77.43	100	81	82.3	101.23

Sasaran Meningkatnya standar pemenuhan sarana prasarana rumah sakit tipe B dapat dilihat dari sebanyak 2 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Status Rumah sakit : persentase pemenuhan bangunan adalah sebesar 90.5 dari target

sebesar 86 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 105.23 %, capaian ini melebihi target yang diperjanjikan. Capaian kinerja nyata indikator 1 "Status Rumah sakit : persentase pemenuhan bangunan "tahun ini meningkat 5.23 Point dari capaian tahun sebelumnya yang mencapai
100.00. Tahun 2023 adalah tahun ke 5 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Status Rumah sakit : persentase pemenuhan bangunan "tahun ini adalah sebesar 105.23 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja maka capaian kinerjanya mencapai 96.28 %.

Capaian kinerja nyata indikator 2 "Status Rumah Sakit : persentase peralatan" adalah sebesar 82.3 dari target sebesar 81 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 101.23 %, capaian ini melebihi target yang diperjanjikan. Capaian kinerja nyata indikator 2 "Status Rumah Sakit : persentase peralatan" tahun ini meningkat 0.67 Point dari capaian tahun sebelumnya yang mencapai 100.56. Tahun 2023 adalah tahun ke 5 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Status Rumah Sakit : persentase peralatan" tahun ini adalah sebesar 101.23 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja maka capaian kinerjanya mencapai 95.70 %.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian indikator ini adalah sebagai berikut :

1. RSUD Balaraja sangat berkomitmen dalam peningkatan sarana dan prasarana dalam pelayanan kesehatan. Hal ini ditunjukkan dengan kondisi bagunan yang lebih baik karena adanya gedung baru untuk pelayanan pasien dengan penjaminan dan gedung-gedung pelayanan yang selalu di pelihara.
2. Alat Kesehatan semakin lengkap karena pemenuhan alat kesehatan dilaksanakan dari berbagai sumber Dana yaitu Dana BLUD, Dana APBD Kab.Tangerang dan DAK.
3. Pada Tahun 2023 RSUD Balaraja telah meningkatkan mutu pelayanan diantaranya dengan memberlakukan sistem pendaftaran Rawat Jalan melalui Reservasi Online, WA, pemisahan loket pendaftaran untuk pasien umum dan BPJS.

Untuk mendukung pencapaian sasaran tersebut dilakukan melalui: **“Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat”** dengan kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan sebagai berikut:

1. Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan
   a. Terlaksananya renovasi Gedung Rawat Inap Lama
   b. Tersedianya Instalasi Hydrant Rumah Sakit

2. Pengadaan Alat-Alat Rumah Sakit
   a. Tersedianya Alat-alat Kesehatan / Kedokteran sebanyak : 96 item

Adapun ***outcame*** kegiatan dari sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

a. Terselenggaranya pemenuhan sarana dan prasarana rumah sakit 100%
b. Terselenggaranya pemenuhan alat kesehatan di RSUD Balaraja sesuai kelas B 90%

Sasaran 4	**Terselanggaranya penyiapan sistem-sistem: perencanaan, keuangan, inventory, kepegawaian, pelayanan mutu pelayanan dan IT**

Sasaran ini terkait dengan Tujuan **"Terselenggaranya Tata Kelola Rumah Sakit dan managemen yang profesional".** Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian indikator sasaran sebagai berikut :

Tabel 2.9
Analisis Pencapaian Sasaran 4
Terselenggaranya penyiapan sistem-sistem : perencanaan, keuangan, inventori, kepegawaian, pelayanan, mutu pelayanan dan IT

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		%	Tahun 2024		%	Tahun 2025		%	Tahun 2026		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Terintegrasinya sistem informasi rumah sakit	%	35	47	100	60	70	117	80	80	80	90	90	100

Sasaran Terselenggaranya penyiapan sistem-sistem : perencanaan, keuangan, inventori, kepegawaian, pelayanan, mutu pelayanan dan IT dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Terintegrasinya sistem informasi rumah sakit" adalah sebesar 90 dari target sebesar 90 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100.00 %, capaian ini sesuai target yang diperjanjikan. Capaian kinerja nyata indikator 1 "Terintegrasinya sistem informasi rumah sakit tahun ini meningkat 20.00 Point dari capaian tahun sebelumnya yang mencapai 80.00. Tahun 2023 adalah tahun ke 5 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Terintegrasinya sistem informasi rumah sakit" tahun ini adalah sebesar 100.00%, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja maka capaian kinerjanya mencapai 111.11 %.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan indikator ini adalah:

1. Dukungan dari semua pihak untuk memanfaatkan IT untuk mempercepat pelayanan kesehatan di semua lini pelayanan.
2. Kebutuhan Rumah Sakit akan IT sehingga memunculkan inovasi- inovasi untuk pemanfaatan Informasi Teknologi.

Untuk mendukung pencapaian sasaran tersebut dilakukan melalui : **"Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat"** dengan kegiatan dengan kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Rumah Sakit**"** yang tertuang dalam RBA BLUD yaitu:

1. Penyediaan Jasa KSO SIM RS dengan hasil kegiatan :
   a. Tersedianya sistem rumah sakit yang memadai
   b. Terpenuhinya sistem manajemen pelaporan RS
   c. Terlaksananya pemberian jasa KSO 12 bulan

   Adapun ***Outcame*** dari sasaran kegiatan tersebut adalah

Tersedianya SIM RS yang memadai 80%.

Sasaran 5	**Meningkatnya kemampuan Rumah Sakit dalam membiayai biaya operasional Rumah Sakit**

Sasaran ini terkait dengan Tujuan **"Terlaksananya Tata Kelola Rumah Sakit dan manajemen yang Profesional".**
Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian indikator sasaran sebagai berikut :

Tabel 2.10
Analisis Pencapaian Sasaran 5
Meningkatnya kemampuan Rumah Sakit dalam membiayai biaya operasional Rumah Sakit

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		%	Tahun 2023		%	Tahun 2024		%	Tahun 2025		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	CRR (Cost Recovery Rate)	%	47	50	106	58	70	108	85	-	85.00	90	-	88.57
2	Status Rumah Sakit	Kategori	Kelas B BLUD Penuh	Kelas B BLUD Penuh	100	Kelas B BLUD Penuh	Kelas B BLUD Penuh	100.00	Kelas B BLUD Penuh	Tipe B dengan BLUD	100.00	Kelas B BLUD penuh	Kelas B Penuh	100

						u h								

Sasaran Meningkatnya kemampuan Rumah Sakit dalam membiayai biaya operasional Rumah Sakit dapat dilihat dari sebanyak 2 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator 1 "CRR(Cost Recoveri Rate)" adalah sebesar 62 dari target sebesar 70 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 88.57 %, capaian ini tidak mencapai target yang diperjanjikan. karena pada Tahun 2023 masih mendapatkan anggaran dari Pemerintah Kabupaten Tangerang, terutama untuk operasional poliklinik baru, dan keperluan akreditasi rumah sakit. Capaian kinerja nyata indikator 1 "CRR (Cost Recoveri Rate)" tahun ini meningkat 13.57 Point dari capaian tahun sebelumnya yang mencapai 75.00. Tahun 2023 adalah tahun ke 5 renstra, capaian kinerja indikator 1 "CRR (Cost Recoveri Rate)" tahun ini adalah sebesar 88.57 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja maka capaian kinerjanya mencapai 82.67 %.

Untuk mendukung pencapaian sasaran tersebut dilakukan melalui : **”Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat”** dengan kegiatan dengan kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Rumah Sakit**”** yang tertuang dalam RBA BLUD yaitu:

1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2. Terlaksananya Penyediaaan Alat Tulis Kantor
3. Terlaksananya Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
4. Penyusunan laporan keuangan akhir tahun
5. Terlaksananya Monitoring,evaluasi dan pelaporan
6. Terlaksananya Inventarisasi aset/barang daerah

Adapun ***Outcame*** dari sasaran kegiatan tersebut adalah terpenuhinya belanja operasional rumah sakit 90%

Capaian kinerja nyata indikator 2 "Status Rumah Sakit" adalah sebesar Kelas B BLUD Penuh dari target sebesar Kelas B BLUD penuh yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100.00 %, capaian ini sesuai target yang diperjanjikan. pada tanggal 03 Januari 2023 RSUD Balaraja ditetapkan sebagai rumah sakit kelas B. Tahun 2023 adalah tahun ke 5 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Status Rumah Sakit" tahun ini adalah sebesar 100.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja maka capaian kinerjanya mencapai 0.00 %.

BAB III
PEMBAHASAN
RENCANA KERJA TAHUN 2025

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Telaah terhadap kebijakan nasional merupakan penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi UPTD. Penyelenggaraan pembangunan kesehatan meliputi upaya kesehatan dan sumber dayanya, harus dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan guna mencapai hasil yang optimal. Upaya kesehatan yang semula dititikberatkan pada upaya penyembuhan penderita secara berangsur-angsur berkembang kearah keterpaduan upaya kesehatan yang menyeluruh. Oleh karena itu, Sistem Kesehatan Nasional memuat upaya peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif) harus dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan, dan dilaksanakan bersama antara Pemerintah dan masyarakat.
Berdasarkan Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaa Pembangunan Nasional (SPPN), dan Undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Tahun atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang dilaksanakan pada unsur penyelenggaraan pemerintah di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat, pada RSUD Balaraja tiap awal tahun dilaksanakan forum gabungan SKPD yang melibatkan stakeholder terkait dan masyarakat.

Di bidang pelayanan kesehatan, RSUD Balaraja Kabupaten Tangerang telah melakukan upaya yang cukup komprehensif guna mewujudkan Visi dan Misi RSUD Balaraja Kabupaten Tangerang dengan menciptakan tata layanan kesehatan yang baik dan merata bagi seluruh pasien yang berkunjung pada RSUD Balaraja Kabupaten Tangerang tanpa membeda-bedakan status, pangkat dan kedudukan pasien, baik pasien tunai maupun pasien dari kalangan masyarakat miskin. Bahkan pada pasien yang berasal dari kalangan masyarakat miskin, seluruh biaya pelayanan kesehatannya ditanggung oleh rumah sakit, baik dari segi layanan perawatan, obat-obatan, tempat tidur dan bagi pasien yang membutuhkan Pelayanan rujukan, RSUD Balaraja Kabupaten Tangerang juga memberikan layanan rujukan kerumah sakit yang tingkatannya lebih tinggi.

Untuk kemajuan dan peningkatan mutu layanan kesehatan, RSUD Balaraja Kabupaten Tangerang memberikan pendidikan dan pelatihan bagi para dokter, perawat dan tenaga fungsional lainnya baik yang diselenggarakan secara intern maupun ekstern, agar kemampuan pelayanan kesehatannya bertambah sehingga akan mempengaruhi fungsi layanan kearah yang lebih baik dan lebih maju.

RSUD Balaraja Kabupaten Tangerang sebagai pusat rujukan layanan kesehatan masyarakat di Kabupaten Tangerang wilayah barat juga secara kontinyu menambah kapasitas peralatan kesehatan dan kedokteran dengan teknologi canggih, dimana peralatan tersebut sangat dibutuhkan demi menunjang pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

RSUD Balaraja Kabupaten Tangerang telah melakukan banyak

perbaikan, baik dari segi layanan administrasi maupun tata cara pelayanannya, salah satunya dengan peningkatan SIM RS (sistem informasi manajemen rumah sakit) agar tugas-tugas administrasi dapat terselesaikan dengan lebih cepat, lebih baik dan lebih akurat. Sebagaimana di bidang pelayanan kesehatan, di bidang layanan administrasi juga diikutkan dalam pelatihan keadministrasian untuk peningkatan pelayanan di bidang jasa administrasi kesehatan. Di bidang penunjang medis dan non medis, sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, RSUD Balaraja Kabupaten Tangerang telah mengadakan peralatan-peralatan dan barang-barang yang dibutuhkan dan melakukan perbaikan terhadap peralatan-peralatan penunjang medis dan non medis guna menunjang pelaksanaan kegiatan pada RSUD RSUD Balaraja Kabupaten Tangerang sesuai dengan kebutuhan, dimulai dari kebutuhan yang paling prioritas hingga kepada kebutuhan yang kurang prioritas. Hal ini dimaksudkan agar dana yang digunakan untuk mengadakan peralatan-peralatan tersebut menjadi lebih efektif, efisien, bermanfaat, berdayaguna dan berhasil guna.

Di dalam pelaksanaan kegiatannya, RSUD Balaraja Kabupaten Tangerang juga memberikan tambahan penghasilan bagi para karyawan dan karyawatinya, baik itu berupa insentif / jasa pelayanan. Hal ini dimaksudkan agar para karyawan dan karyawatinya dapat bekerja lebih maksimal dan lebih profesional, sehingga pelayanan kepada para costumer rumah sakit menjadi lebih baik, yang pada akhirnya akan berpengaruh pada peningkatan kunjungan rumah sakit yang secara otomatis akan berpengaruh pula pada peningkatan pendapatan sekaligus kesejahteraan karyawan/karyawati rumah sakit.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI RSUD BALARAJA

Sebagaimana dirumuskan dalam Rencana Kerja Pemerintah bahwa program prioritas bidang kesehatan sebagai urusan wajib Pemerintah adalah bertujuan untuk meningkatan kinerja (perfomance) pelayananan publik/pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna di rumah sakit. Berdasarkan data dan prioritas masalah di atas diketahui bahwa pelayanan RSUD Balaraja Kabupaten Tangerang perlu dikembangkan/ ditingkatkan dengan menangkap peluang pasar segmen menengah yang potensial, tanpa meninggalkan fungsi sosial rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin sesuai program pemerintah.

Untuk dapat menentukan faktor keberhasilan dalam pengembangan layanan tersebut dengan memperhatikan hasil kegiatan pelayanan, kondisi umum penyelenggaraan pelayanan kesehatan rumah sakit pemerintah serta permasalahan-permasalahan yang ada perlu dilakukan identifikasi terhadap faktor-faktor strategik yang mempengaruhi dengan menggunakan teknik analisis SWOT, yaitu teknik analisis manajemen dengan mengidentifikasi faktor–faktor kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunity) dan ancaman (threats) sebagai berikut:

1. STRENGTHS
   a. Lokasi Rumah Sakit Strategis Berada di lingkungan padat penduduk dan daerah industri dan di jalur jalan lintas provinsi
   b. Tersedianya bangunan sebagai tempat penyelenggaraan

pelayanan kesehatan;

c. Tersedia Tenaga Dokter Ahli yang memadai

d. Dukungan Pemerintah Provinsi dalam pengelolaan langsung pendapatan fungsional untuk operasional pelayanan rumah sakit (BLUD);

e. Dukungan stakeholder yang menjadikan RSUD sebagai SKPD unggulan pelayanan publik bidang kesehatan.

2. WEAKNESSES

a. Belum terciptanya budaya organisasi yang mendukung pengembangan pelayanan kesehatan RS secara optimal;

b. Fasilitas dan peralatan pendukung pelayanan masih kurang dari standar sehingga pelayanan kurang optimal;

c. Sistem Informasi Manajemen RS (SIMRS) Belum di Manfaatkan Secara Optimal

d. Kurang tertibnya penataan administrasi aset dan pemeliharaan sebagai pendukung jaminan mutu pelayanan kesehatan RS;

e. Belum optimalnya penyelenggaraan trayek angkutan umum yang melintasi rumah sakit.

3. OPPORTUNITIES

a. Adanya keinginan (needs) dan pemanfaatan fasilitas kesehatan oleh masyarakat (demand) yang cukup tinggi;

b. Berkembangnya wilayah Kabupaten Tangerang menjadi pusat kegiatan industri dan ekonomi sehingga memperluas pangsapasar;

c. Banyaknya perusahaan-perusahaan swasta disekitar RSUD sehingga memungkinkan diperluasnya ikatan kerja sama;

d. Stake Holder yang mendukung kebijakan manajemen RS, dalam peningkatan kinerja pelayanan publik;

e. Adanya Jaminan Kesehatan Nasional oleh Pemerintah (JKN)

f. Masyarakat miskin yang tidak terjaring BPJS dibiayai oleh Pemerintah Daerah dengan menggunakan fasilitas Jamkesda.

4. THREATS

a. Berdirinya rumah sakit – rumah sakit swasta dengan fasilitas peralatan medik canggih dan lengkap dengan sarana pendukung;

b. Era pasar bebas masuknya modal asing dan fasilitas kesehatan swasta luar negeri.

Sebagaimana dalam hasil interaksi SWOT, Strategi peningkatan kinerja pelayanan RSUD Balaraja Kabupaten Tangerang dirumuskan sebagai berikut:

1. Optimalkan semua sumber daya (tenaga, sarana prasarana, peraturan-peraturan) untuk meningkatkan kinerja pelayanan RS, dengan menangkap peluang pasar menengah atas;

2. Tingkatkan kuantitas dan kualitas sarana prasarana, SDM dan jenis layanan untuk menangkap peluang pasar (masyarakat) kelas menengah atas potensial dengan pemberian pelayanan jasa lebih dari standar;

3. Jalin kerjasama pelayanan kesehatan dengan rumah sakit-rumah sakit pesaing dengan memanfaatkan semua sumber daya yang dimiliki serta peraturan dan ketentuan yang mendasari untuk peningkatan produktivitas pelayanan.
4. Perbaiki, peliharaan dan lengkapi sumber daya dengan sistem dan prosedur yang mengarah pada peningkatan kualitas dengan mengutamakan kepentingan pasien/ pelanggan/konsumen.

p. Sesuai dengan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja Kabupaten Tangerang Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang RSUD Balaraja memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

Tugas :

RSUD Balaraja bertugas melaksanakan pelayanan pengobatan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit yang dilaksanakan melalui rawat inap, rawat jalan, gawat darurat (emergency) dan tindakan medik, secara serasi dan terpadu dengan upaya peningkatan pelayanan pengobatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan, sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Fungsi :

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, RSUD Balaraja mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Penyelenggaraan pengelolaan teknis administratif tata usaha, umum, administrasi keuangan, kepegawaian dan kebutuhan sarana dan prasarana rumah sakit;
b. Penyelenggaraan pelayanan keperawatan dan asuhan keperawatan dalam rangka mendukung pelayanan medik ;
c. Penyelenggaraan upaya pemasaran pelayanan Rumah Sakit dan kerja sama dengan pihak ketiga untuk pelayanan Rumah Sakit melalui sistem asuransi ;
d. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan tenaga medis, para medis fungsional dan non medis untuk memenuhi kebutuhan rumah sakit, serta menyediakan lahan pendidikan bagi institusi pendidikan tenaga medis, para medis dan non medis ;
e. Pelaksanaan kerjasama dan koordinasi dengan instansi, lembaga / institusi terkait dalam upaya mendukung pelaksanaan tugas ;
f. Pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan medik, penunjang medik dan non medik;

Dalam penyelenggaraan Tugas dan Fungsinya ada beberapa yang menjadi isu-isu penting antara lain:

- Terbatasnya jumlah tenaga medis/paramedis (rasio tidak seimbang)
- Belum optimalnya pendayagunaan SDM
- Masih lemahnya sistem reward & punishment
- Kelembagaan sedang menuju Tipe B Pendidikan berstatus PPK BLUD
- Kurang optimalnya sistem informasi manajemen rumah sakit

3.3 . TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Tujuan dan sasaran pada hakekatnya merupakan arahan bagi setiap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi dalam mendukung pelaksanaan Misi, untuk mewujudkan Visi RSUD Balaraja selama kurun waktu 2025 -2029. Tujuan dan sasaran pada masing – masing Misi diuraikan sebagai berikut :

3.2.1. Tujuan dan Sasaran dari Misi 1

Meningkatkan kompetensi SDM di segala lini pelayanan, baik pelayanan medis maupun manajemen didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai serta sistem manajemen yang efektif dan efisien

1. Terpenuhinya SDM yang mempunyai skill, knowledge dan attitude yang sesuai norma-norma di masyarakat dengan sasaran :

   1.1. Terwujudnya kompetensi SDM dalam bidang manajemen, teknis,medis, keperawatan dan Customer Care

3.2.2. Tujuan dan Sasaran dari Misi 2

Memberikan pelayanan kesehatan individu yang berkualitas, menyenangkan dan santun

1. Terwujudnya standar pelayanan di Rumah Sakit, dengan sasaran :

   1.1. Meningkatnya Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit

   a. Meningkatnya pelayanan Instalasi Gawat Darurat

   b. Meningkatnya Pelayanan Medik di Instalasi Rawat Jalan

   c. Meningkatnya Pelayanan Medik di Instalasi Rawat Inap

   d. Meningkatnya Pelayanan Medik di Unit Kebidanan dan Kandungan serta Perinatologi

   e. Meningkatnya Pelayanan Medik di Instalasi Kamar Bedah Sentral

   f. Meningkatnya Pelayanan Medik di Instalasi Rawat Intensif Care

   g. Meningkatnya Pelayanan Penunjang Medik di Instalasi Radiologi

   h. Meningkatnya Pelayanan Penunjang Medik di Instalasi Laboratorium

   i. Meningkatnya Pelayanan Penunjang Medik di Instalasi Rehabilitasi Medik

   j. Meningkatnya Pelayanan Penunjang Medik di Instalasi Farmasi

   k. Meningkatnya Pelayanan Penunjang Medik di Instalasi Gizi

   l. Meningkatnya Pelayanan Penunjang Medis di BDRS

   m. Meningkatnya Pelayanan Penunjang Non Medis

Instalasi Rekam Medik

n. Meningkatnya Pelayanan Penunjang Non Medis di Unit Pengolahan Limbah

o. Meningkatnya Pelayanan Penunjang Non Medik di Instalasi Laundry.

p. Meningkatnya Pelayanan ambulance dan mobil jenazah .

q. Meningkatnya Pelayanan di Instalasi Pemulasaran Jenazah.

r. Meningkatnya pelayanan Penunjang Non Medik di Instalasi Pemeliharaan Sarana/Prasarana

s. Meningkatnya Pelayanan Keamanan, kebersihan dan ketertiban

3.2.3. Tujuan dan Sasaran dari Misi 3

Mendukung Rencana Pembangunan Daerah dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Tangerang

1. Tersedianya baangunan yang enak dilihat, bersih, menarik, nyaman, serta tersedianya peralatan yang lengkap dan mengikuti perkembangan teknologi dengan sasaran :

   1.1 Meningkatnya standar pemenuhan sarana dan prasarana Rumah Sakit tipe B

2. Terlaksananya tata kelola Rumah Sakit dan Manajemen yang professional dengan sasaran :

   1.1 Terselenggaranya penyiapan sistem – sistem : perencanaan, keuangan, inventory, kepegawaian, pelayanan mutu dan IT

   1.2 Meningkatnya kemampuan Rumah Sakit dalam membiayai biaya operasional Rumah Sakit.

3.4. PROGRAM DAN KEGIATAN

Perumusan program dan kegiatan Tahun 2025 didasarkan pada Renstra 2025 - 2029 dan RKPD Tahun 2024. Program dan kegiatan mengacu sesuai dengan tugas dan fungsi Rumah sakit.

Adapun program kegiatan RSUD Balaraja Kabupaten Tangerang terbagi kedalam 2 (dua) program utama yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, yang terdiri dari 3 Sub Kegiatan dan , yaitu :

   1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

   2) Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor

   3) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD

2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, terdiri dari 1 (satu) kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan yaitu:

1) Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya,

   Dengan output sub kegiatan tersedianya gedung rumah sakit dan sarana pendukungnya

2) Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan,

   Dengan output sub kegiatan :

   - Tersedianya alat-alat Kesehatan rumah sakit sebanyak 75 unit

3) Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan

   - Tersedianya obat-obatan rumah sakit 1 paket
   - Tersedianya bahan pakai habis medis sebanyak 1 paket
   - Tersedianya bahan kimia reagensia rumah sakit sebanyak 1 paket

Adapun uraian program dan kegiatan serta indikator sasaran dapat dilihat pada Lampiran (Rencana Kerja RSUD Balaraja Tahun 2025).

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

RenJa (Rencana Kerja) Perubahan Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja Kabupaten Tangerang Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Tangerang No 074/Kep.268-Huk/2013 tentang Penetapan RSUD Balaraja Kabupaten Tangerang untuk menerapkan PPK-BLUD (Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah) dengan status Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) penuhan kegiatan tahun 2025 di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja Kabupaten Tangerang, guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah tahun 2025. Renja Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja Kabupaten Tangerang Tahun 2025 mengacu kepada Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang Tahun 2025 - 2029, yang telah memuat hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, memuat permasalahan yang dihadapi oleh Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja Kabupaten Tangerang dalam pelaksanaan program dan kegiatan, serta telah mengakomodir usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyrakat melalui sistem penganggaran berbasis buttom-up atau data dari user.

Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Renja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan perencanaan pembangunan dan statistik yang diemban oleh Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja Kabupaten Tangerang sebagai salah satu UPTD di lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan isi Renja Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja Kabupaten Tangerang.

Semoga Renja Perubahan Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja Kabupaten Tangerang Tahun 2025 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Tahun 2025.

Rencana Kerja perubahan RSUD Balaraja Kabupaten Tangerang Tahun 2025 merupakan dokumen rencana tahunan yang disusun berdasarkan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang. Rencana kerja merupakan kondisi yang realistis dari perencanaan kegiatan RSUD Balaraja Kabupaten Tangerang secara menyeluruh yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu Juli sampai dengan 31 Desember 2025.

Diharapkan Rencana Kerja ini merupakan pedoman dan acuan dalam menyusun Rencana Kerja Dan Anggaran Perubahan Tahun 2025, oleh sebab itu semua pihak dapat mendukung program, kegiatan dan sub kegiatan dalam mewujudkan Visi dan Misi RSUD Balaraja Kabupaten Tangerang.

BAB V
PENUTUP

Renja (Rencana Kerja) Perubahan Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja Kabupaten Tangerang Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Tangerang No 074/Kep.268-Huk/2013 tentang Penetapan RSUD Balaraja Kabupaten Tangerang untuk menerapkan PPK-BLUD (Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah) dengan status Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) penuhan kegiatan tahun 2025 di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja Kabupaten Tangerang, guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah tahun 2025. Renja Perubahan Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja Kabupaten Tangerang Tahun 2025 mengacu kepada Renstra RSUD Balaraja Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029, yang telah memuat hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, memuat permasalahan yang dihadapi oleh Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja Kabupaten Tangerang dalam pelaksanaan program dan kegiatan, serta telah mengakomodir usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyrakat melalui sistem penganggaran berbasis buttom-up atau data dari user.

Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Renja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan perencanaan pembangunan dan statistik yang diemban oleh Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja Kabupaten Tangerang sebagai salah satu UPTD di lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan isi Renja Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja Kabupaten Tangerang.

Semoga Renja Perubahan Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja Kabupaten Tangerang Tahun 2025 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Tahun 2025.

Rencana Kerja Perubahan RSUD Balaraja Kabupaten Tangerang Tahun 2025 merupakan dokumen rencana tahunan yang disusun berdasarkan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang. Rencana kerja merupakan kondisi yang realistis dari perencanaan kegiatan RSUD Balaraja

Kabupaten Tangerang secara menyeluruh yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu Juli sampai dengan 31 Desember 2025.

Diharapkan Rencana Kerja Perubahan ini menjadi pedoman dan acuan dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran Perubahan Tahun 2025, oleh sebab itu semua pihak dapat mendukung program, kegiatan dan sub kegiatan dalam mewujudkan Visi dan Misi RSUD Balaraja Kabupaten Tangerang.

23. Dinas Perhubungan

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) SKPD merupakan rancangan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh masing – masing SKPD pada tahun yang direncanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka menunjang pencapaian visi dan misi kepala daerah terpilih. Program dan kegiatan dalam Renja Perubahan SKPD masih bersifat indikatif yang diselaraskan dengan program dan kegiatan prioritas daerah. Pada tahap ini dilakukan kegiatan persiapan penyusunan, kegiatan analisis dan pengkajian dokumen terkait, dan kegiatan penyusunan Renja SKPD.

Penyusunan Renja Perubahan SKPD merupakan tahapan akhir yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja SKPD yang definitif dan merupakan tanggung jawab masing – masing kepala SKPD yang proses penyusunannya mengacu pada rancangan akhir RKPD, untuk itu masing – masing SKPD perlu membentuk tim penyusun Renja Perubahan SKPD yang bertugas melaksanakan seluruh proses penyusunan dokumen Renja Perubahan SKPD sampai dengan penyusunan RKA – SKPD.

Dalam prosesnya, penyusunan Renja Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan akhir RKPD. Oleh karena itu penyusunan Renja Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan akhir RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang, evaluasi pelaksanaan Renja Perubahan.

Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang.

Penyusunan Renja Perubahan SKPD sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah Tahun 2025 memiliki beberapa tahapan, antara lain :

1. Persiapan penyusunan Renja Perubahan SKPD;
2. Penyusunan Renja Perubahan SKPD;
3. Pelaksanaan Forum SKPD; dan
4. Penetapan Renja Perubahan SKPD

Persiapan penyusunan Renja Perubahan SKPD sebagaimana dimaksud diatas, meliputi :

1. Penyusunan rancangan keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusunan Renja Perubahan SKPD;
2. Orientasi mengenai Renja Perubahan SKPD;
3. penyusunan agenda kerja tim penyusunan Renja Perubahan SKPD; dan
4. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah

Penyusunan Renja Perubahan SKPD disusun:

1. mengacu pada rancangan akhir RKPD;

2. mengacu pada Renstra SKPD;
3. mengacu pada hasil evaluasi pelakasanaan program dan kegiatan periode sebelumnya;
4. untuk memecahkan masalah yang dihadapi; dan
5. berdasarkan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat

Perumusan Renja Perubahan SKPD sebagaimana dimaksud mencakup:
a. persiapan penyusunan Renja Perubahan SKPD;
b. pengolahan data dan informasi;
c. analisis gambaran pelayanan SKPD;
d. mereview hasil evaluasi Renja Perubahan SKPD tahun lalu berdasarkan Renstra SKPD;
e. penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD;
f. penelaahan rancangan akhir RKPD;
g. perumusan tujuan dan sasaran;
h. penelaahan usulan masyarakat; dan
i. perumusan kegiatan prioritas.

Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja Perubahan Dinas Perhubungan mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja Perubahan SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja Perubahan merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2025.
3. Renja Perubahan SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2025 ini merupakan tahun kedua pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra).

Mengingat arti strategis dokumen Renja Perubahan SKPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak akhir tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja Perubahan SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Kabupaten Tangerang Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Peraturan Bupati Tangerang Nomor 39 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026,tanggal pengesahan 31 maret 2023 antara lain :

1. Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disingkat RPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah Tahun 2024-2026 berlaku untuk periode 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.

2. RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai pedoman Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah serta dokumen perencanaan pembangunan lainnya pada periode tahun 2024 sampai dengan tahun 2026 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk lebih jelasnya, di bawah ini dapat kita lihat bagan alir tahapan penyusunan Renja SKPD Kabupaten/Kota.

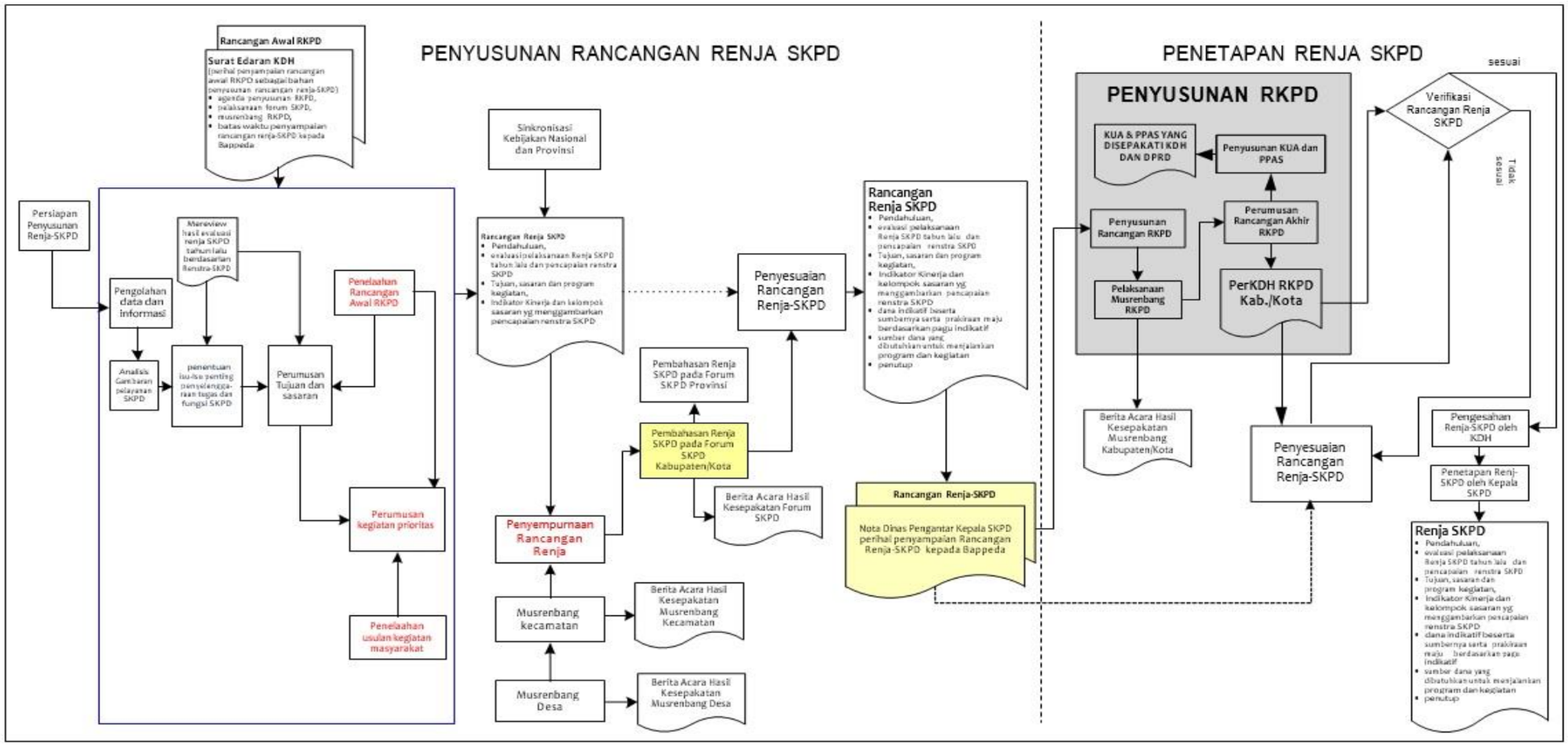
PENYUSUNAN RANCANGAN RENJA SKPD
PENETAPAN RENJA SKPD
Rancangan Awal RKPD
Surat Edaran KDH
(perihal penyampaian rancangan awal RKPD sebagai bahan penyusunan rancangan renja-SKPD)
agenda penyusunan RKPD,
pelaksanaan forum SKPD,
musrenbang RKPD,
batas waktu penyampaian rancangan renja-SKPD kepada Bappeda
Persiapan Penyusunan Renja-SKPD
Pengolahan data dan informasi
Mereview hasil evaluasi renja SKPD tahun lalu berdasarkan Renstra-SKPD
Penelaahan Rancangan Awal RKPD
Analisis Gambaran pelayanan SKPD
penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD
Perumusan Tujuan dan sasaran
Perumusan kegiatan prioritas
Penelaahan usulan kegiatan masyarakat
Sinkronisasi Kebijakan Nasional dan Provinsi
Rancangan Renja SKPD
Pendahuluan,
evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan pencapaian renstra SKPD
Tujuan, sasaran dan program kegiatan,
Indikator Kinerja dan kelompok sasaran yg menggambarkan pencapaian renstra SKPD
Penyempurnaan Rancangan Renja
Pembahasan Renja SKPD pada Forum SKPD Provinsi
Pembahasan Renja SKPD pada Forum SKPD Kabupaten/Kota
Berita Acara Hasil Kesepakatan Forum SKPD
Penyesuaian Rancangan Renja-SKPD
Rancangan Renja SKPD
Pendahuluan,
evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan pencapaian renstra SKPD
Tujuan, sasaran dan program kegiatan,
Indikator Kinerja dan kelompok sasaran yg menggambarkan pencapaian renstra SKPD
dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif
sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan
penutup
Musrenbang kecamatan
Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang Kecamatan
Musrenbang Desa
Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang Desa
Rancangan Renja-SKPD
Nota Dinas Pengantar Kepala SKPD perihal penyampaian Rancangan Renja-SKPD kepada Bappeda
PENYUSUNAN RKPD
KUA & PPAS YANG DISEPAKATI KDH DAN DPRD
Penyusunan KUA dan PPAS
Penyusunan Rancangan RKPD
Perumusan Rancangan Akhir RKPD
Pelaksanaan Musrenbang RKPD
PerKDH RKPD Kab./Kota
Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang Kabupaten/Kota
Penyesuaian Rancangan Renja-SKPD
Verifikasi Rancangan Renja SKPD
sesuai
Tidak sesuai
Pengesahan Renja-SKPD oleh KDH
Penetapan Renj-SKPD oleh Kepala SKPD
Renja SKPD
Pendahuluan,
evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan pencapaian renstra SKPD
Tujuan, sasaran dan program kegiatan,
Indikator Kinerja dan kelompok sasaran yg menggambarkan pencapaian renstra SKPD
dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif
sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan
penutup

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renja Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026 berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Dj awa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 285 1);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahlun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahur, 2022 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor I Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 20 15 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia Bidang Transportasi;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2013 tentang Investigasi Kecelakaan Transportasi;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
21. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
22. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

24. Peraturan Dalam Negeri Nomor 09 Tahun 2018 Tentang Reviu Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, beserta Pemutakhirannya melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2022 Tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2023;
29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
30. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru;
31. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 26);
32. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten 2010-2030;
33. Peraturan Gubernur Banten Nomor 33 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2023-2026;
34. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 39 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026
35. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1116) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 2 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2022 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0222);

36. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud

Maksud Penyusunan Renja Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang Tahun 2025 adalah untuk menyelaraskan dengan Penyesuaian Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026, tentang Penyesuaian Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA SKPD) Dinas Perhubungan Tahun 2024-2026.

Tujuan

Adapun tujuan Rencana Kerja Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang Tahun 2025, yaitu :

1. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi dokumen Renja Perhubungan dengan Renstra Dinas Perhubungan atau dengan dokumen lainnya yang terkait;
2. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah setiap tahunnya;
3. Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang Tahun 2025 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar belakang
- 1.2 Landasan hukum
- 1.3 Maksud dan tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN TRIWULAN II

- 2.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 s.d Triwulan II
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan
- 2.3 Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
- 2.4 Capaian Target dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 s.d Triwulan II

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Bab ini menguraikan tentang rencana kerja dan kerangka pendanaan yang akan dilaksanakan pada tahun berjalan.

BAB IV PENUTUP

Bab Penutup menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2025

2.1. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 dampai dengan Triwulan II

Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan di Kabupaten Tangerang Tahun 2025, hasil reviu dan Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan berdasarkan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 75 Tahun 2023 tentang indikator Kinerja Utama Tahun 2024-2026 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang telah ditetapkan sebanyak 2 sasaran strategis dan sebanyak 2 Indikator Kinerja Utama (Outcomes) dengan rincian sebagai berikut:

Sasaran 1: Mengatasi Ketimpangan Aksesbilitas Transportasi Antar Wilayah

- Rasio Konektivitas Kabupaten
- Rasio Trayek Yang Aktif
- Rasio Penanganan Kemacetan

Sasaran 2: Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Perangkat Daerah

- Nilai AKIP Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang

A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA

Dalam rangka mengukur dan meningkatkan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Sebagai upaya untuk meningkatkan Akuntabiilitas Pemerintah, Kabupaten Tangerang menetapkan Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2023 tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2024-2026 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang. Pada tanggal 5 Januari 2024, selain itu dilakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Capaian Indikator Kinerja Utama ditentukan atas target yang akan dicapai dengan cara pengukuran atau formulasi yang telah ditetapkan. Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang Tahun 2024 menunjukan hasil sebagai berikut:

Tabel 2.1
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TANGERANG
TAHUN 2024-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian
					2023*	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perhubungan	Mengatasi Ketimpangan Aksesbilitas Transportasi	Rasio Konektivitas Kabupaten	Rasio	0,95	0,76	0,79

		Antar Wilayah	Rasio Trayek Yang Aktif	Rasio	0,29	0,32	0,39
			Rasio Penanganan Kemacetan	Rasio	0,48	0,46	0,44
2	Meningkatkan Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Perangkat Daerah	Nilai AKIP Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang	Angka	74	75,00	76

B. Capaian Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Sampai Dengan Triwulan II

Tabel 2.2
Capaian Sasaran Strategis dan
Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan

KODE	SASARAN DAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN DAN PROGRAM	Satuan	Target indikator	Realisasi Indikator	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7=(6/5)*100
1	**Mengatasi Ketimpangan Aksesbilitas Transportasi Antar Wilayah**	Rasio Konektivitas Kabupaten	Rasio	0,79	0,00	0,00
		Rasio Trayek Yang Aktif	Rasio	0,39	0,00	0,00
		Rasio Penanganan Kemacetan	Rasio	0,44	0,00	0,00
2	**Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Perangkat Daerah**	Nilai AKIP Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang	Angka	76	77,75	102,30
2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**					
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	%	100	25	25.00%
2.15.02		Persentase Perlangkapan Jalan	%	75	0,00	0.00 %

	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Penanganan Titik Kemacetan Lalu Lintas	%	66,67	0,00	0.00 %
		Rasio tingkat keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan	Angka	0,5	0,00	0.00 %
		Terminal yang terbangun	Terminal	1	0,00	0.00 %
		Tersedianya Jaringan Angkutan yang Beroperasi	Jaringan	2	0,00	0.00 %

Tabel T-C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan II Tahun 2025 (tahun berjalan)
Kabupaten Tangerang

Nama Perangkat Daerah :Dinas Perhubungan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	100 Persen	0 Persen	0 Persen	0 Persen	0 Persen	100 Persen	50 Persen	50%
		Persentase pemenuhan Administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan Dishub	0 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	0 Persen	0%
		Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah Dishub	0 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	0 Persen	0%
		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	6 Dokumen	3 Dokumen	50%
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0%

X.XX.01.2.02	Administrasi KeuanganPerangkat Daerah	Jumlah dokumen dokumen adminstrasi keuangan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	6 Dokumen	50%
X.XX.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dokumen Barang Milik Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0%
X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Pembinaan Pegawai	2 Dokumen	10 Orang	10 Orang	10 Orang	1 Dokumen	2 Dokumen	0 Dokumen	0%
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	7 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	100%
		Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	7 Jenis	7 Jenis	7 Jenis	7 Jenis	7 Jenis	7 Jenis	6 Jenis	85,71%
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen Jasa Penunjang	6 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	100%
		Tersedianya Jasa Penunjang	0	6 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	0	0	50%
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	100%
		Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0	5 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	0	0	0
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio tingkat keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan	0.30 Rasio	70 Persen	0.30 Rasio	0.30 Rasio	0.30 Rasio	0.30 Rasio	0.29 Rasio	96,67%
		Tersedianya Jaringan Angkutan yang Beroperasi	1 Jaringan	96.55 Persen	96.55 Persen	96.55 Persen	96.55 Persen	1 Jaringan	0 Jaringan	0%
		Persentase Perlangkapan Jalan	58 Persen	100 Persen	75 Persen	75 Persen	75 Persen	58 Persen	91,67 Persen	158,05%
		Persentase Penanganan Titik Kemacetan Lalu Lintas	33,33 Persen	77.78 Persen	33,33 Persen	33,33 Persen	33,33 Persen	33,33 Persen	0 Persen	0%
		Terminal yang terbangun	1 Terminal	0 Terminal	0 Terminal	0 Terminal	0 Terminal	1 Terminal	0 Terminal	0%
2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	8 Dokumen	2 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	0 Dokumen	0%
2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Tersedianya Perlengkapan Jalan	7 Jenis	12 Jenis	7 Jenis	7 Jenis	7 Jenis	7 Jenis	4 Jenis	57,14%
2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Terlaksananya pengelolaan terminal penumpang tipe C	1 Jumlah	0 Jumlah	0 Jumlah	0 Jumlah	0 Jumlah	1 Jumlah	1 Jumlah	0%
2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Tersedianya Titik Parkir di Jalan kabupaten	80 Titik	70 Titik	80 Titik	80 Titik	80 Titik	80 Titik	17 Titik	56,67%
2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kendaraan Bermotor yang diuji	70,59 Persen	0 Persen	69,41Persen	37,57 Persen	37,57 Persen	69,41Persen	22,98 Persen	33,11%

2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Penanganan Titik yang di Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten	1 Titik	2 Titik	1 Titik	1 Titik	1 Titik	1 Titik	0 Titik	0%
2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Fasilitasi dan Evaluasi Analisis Dampak Lalu Lintas	4 Dokumen	110 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	0 Dokumen	0%
2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Pelaksanaan Audit, Inspeksi, dan Pemantauan Keselamatan LLAJ di Jalan	29 Laporan	0 Laporan	29 Laporan	23 Laporan	23 Laporan	29 Laporan	6 Laporan	20,69%
2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jaringan Pelayanan Angkutan Orang dan Barang		1 Jaringan	1 Jaringan	1 Jaringan	1 Jaringan			0%
		Tersedianya Pelayanan Angkutan Massal	32 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	32 Unit	32 Unit	100%
2.15.02.2.14	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kepatuhan Pengurusan Perijinan Angkutan Orang	1 Persen	8,52 Persen	9,23 Persen	1,98 Persen	1,98 Persen	1 Persen	0	0%

Capaian prosentase realisasi Belanja Langsung pada Triwulan II tahun 2025 sebesar 41,06%,

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi seluruh program dan kegiatan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang Tahun 2025 sampai dengan Bulan Juni 2025 dapat disimpulkan bahwa realisasi keuangan mencapai sebesar 41,06%, dengan realisasi fisik sebesar 50 %

Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang menyadari bahwa masih ada kelemahan/ kekurangan yang harus diperbaiki dan dilakukan untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi terhadap apa yang telah dilaksanakan guna mengetahui penyebab kekurangan/ kegagalan tersebut sebagai umpan balik/ feed back dari apa yang telah dan akan dilaksanakan. Beberapa evaluasi realisasi kegiatan dapat dikategorikan sebagai berikut:

I. PERMASALAHAN

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 yang telah dilaksanakan,dapat dilihat bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dalam penyerapan masih ada bebrapa kegiatan yang realisasinya rendah meskipun demikian adanya beberapa kendala teknis pelaksanaan kegiatan serta adanya ke tidak sesuaian target indikator sesuai Renstra yang ada dengan dokumen yang menjadi acuan pelaksanaan kegiatan Meskipun pelaksanaan program dan kegiatan dapat dikatakan baik, akan tetapi masih ditemukan beberapa permasalahan.

Permasalahan yang timbul bukan karena pelaksanaan program dan kegiatan tidak sesuai, melainkan adanya Perubahan Anggaran Kas Pada Penjabaran pada proses pengadaan Barang dan jasa sementara proses pengadaan tersebut sedang berlangsung hal ini mengakibatkan pencairannya Rendah, maka perlu adanya koordinasi dan konsultasi dengan pihak-pihak terkait.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan

Untuk menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang dalam pelaksanaannya disesuaikan tugas pokok, fungsi dan norma standar pelayanan yang telah ditentukan oleh Dinas Perhubungan. Adapun hasil analisa pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang adalah sebagaimana tertuang dalam tabel 2.2.

Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan
Kabupaten Tangerang

No	Indikator	SPM/ Standart Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
1	Rasio Konektivitas Kabupaten	-	Rasio konektivitas Kabupaten Tangerang	0,95	0,76	0,79	0,83	0,84	0,7	0,76	0,79	
2	Rasio Penanganan Kemacetan	-	V/C Rasio Jalan di Kabupaten	0,48	0,46	0,44	0,38	0,54	0,28	0,46	0,44	

Transportasi merupakan salah satu permasalahan yang sering terjadi di kawasan perkotaan, dimana permasalahan utama adalah kemacetan lalu lintas. Permasalahan kemacetan lalu lintas memberikan dampak negatif terhadap besarnya biaya transportasi, pemborosan waktu dan energi, serta dampak sosial dan lingkungan. Dalam jangka panjang permasalahan transportasi ini akan berakibat pada turunnya daya saing ekonomi kota serta *livability* kota bagi kehidupan penduduknya. Begitu pula di Kabupaten Tangerang, permasalahan transportasi menjadi salah satu permasalahan klasik yang cukup sulit untuk diselesaikan.

Kabupaten Tangerang termasuk salah satu daerah tingkat dua yang menjadi bagian dari wilayah Propinsi Banten. Terletak pada posisi geografis yang cukup strategis dengan ibukotanya adalah Tigaraksa. Letak astronomis antara 6°00'- 6°20' Lintang Selatan dan 106°20'-106°43' Bujur Timur. Luas wilayah Kabupaten Tangerang 959,51 km2 atau 9,93 % dari seluruh luas wilayah Propinsi Banten dengan batas wilayah sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah timur berbatasan dengan Kota Tangerang Selatan dan Kota Tangerang, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bogor dan Kota Depok, sedangkan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Serang dan Lebak. Hasil Proyeksi Penduduk 2020 menunjukkan bahwa jumlah penduduk Kabupaten Tangerang mencapai lebih dari 3,24 juta orang, terdiri dari 1,66 juta laki-laki dan 1,54 juta perempuan. Persentase penduduk Tangerang pada tahun 2020 mencapai 27,26 persen dari total penduduk Banten yang berjumlah lebih dari 11,90 juta orang. Disamping itu, di wilayah Kabupaten Tangerang terdapat pembangunan kawasan perumahan dan industri di kawasan pinggiran atau luar kota yang akan memanfaatkan jaringan utama (ruas jalan tol atau arteri). Kecepatan pembangunan pemukiman dan industri hampir selalu tidak sebanding dengan kecepatan pembangunan jalan sehingga dalam waktu yang sangat singkat kapasitas jalan sudah mendekati jenuh atau bahkan sudah terlampaui. Jarak yang semakin jauh dari tempat tinggal menuju tempat kerja, mendorong penggunaan kendaraan pribadi semakin meningkat.

Meningkatnya penggunaan kendaraan pribadi secara langsung berpengaruh terhadap kinerja persimpangan yang ada pada jalan kabupaten di wilayah Kabupaten Tangerang. Peningkatan derajat jenuh dan tundaan simpang yang terjadi akan memperpanjang waktu perjalanan para pengguna jalan. Hal ini perlu ditindaklanjuti dengan pengukuran kinerja persimpangan di jalan kabupaten yang selanjutnya diusulkan upaya mengatasi penurunan kinerja persimpangan tersebut terdiri dari 9 persimpangan yang meliputi

- Simpang tidak bersinyal :
  1. Simpang 3 Islamic
  2. Simpang 3 Kelapa Dua
  3. Simpang 4 Rajeg Kukun
  4. Simpang 4 Sepatan
  5. Simpang 3 Merak Balaraja
  6. Simpang Pinang Tigaraksa
  7. Simpang 3 PLN Pasar Kemis
  8. Simpang 3 Pasar Kemis
  9. Simpang 3 Gelam

Strategi peningkatan kinerja simpang dilakukan pada tahun eksisting tanpa melakukan proyeksi peningkatan volume lalu lintas pada tahun rencana. Indikator yang digunakan dalam pengukuran tingkat pelayanan simpang adalah tundaan simpang

Vc rasio adalah untuk mengetahui kinerja persimpangan pada kondisi eksisting kemudian melakukan upaya perbaikan kinerja persimpangan.

Tujuan Vc rasio ini adalah sebagai berikut :

1. Menghitung derajat jenuh persimpangan pada jalan kabupaten di wilayah kabupaten Tangerang.
2. Menghitung tundaan persimpangan pada jalan kabupaten di wilayah kabupaten Tangerang.
3. Melakukan upaya mengatasi penurunan kinerja persimpangan pada jalan kabupaten di wilayah kabupaten Tangerang.

Berdasarkan data jaringan jalan dari Bina Marga Kabupaten Tangerang, panjang jalan yang ada di Kabupaten Tangerang adalah 1.133,04 Km. Dimana dalam pembagiannya berdasarkan status jalan Jalan Di Kabupaten Tangerang.

Status Jalan	Panjang Jalan (km)
Jalan Nasional	27,93
Jalan Provinsi	114,49
Jalan Kabupaten	990,62

2.3. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Pelaksanaan program dan kegiatan yang tercantum dalam Renja Perangkat Daerah meliputi rancangan RKPD dan usulan pemangku kepentingan dari hasil Musrenbang Kabupaten Tangerang yang diawali oleh Musrenbang tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Pokok Pikiran DPRD. Adapun usulan program dan kegiatan masyarakat sebagaimana tertuang dalam Tabel T-C.32.

Tabel T-C.32
Usulan Program dan kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Kabupaten Tangerang

Dinas Perhubungan

No	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
-	-	-	-	-	-

2.4. Capaian Target dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 s.d Triwulan II

Nama Perngkat Daerah : Dinas Perhubungan

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Capaian (%)	Realisasi Fisik Kegiatan (%)	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Satuan	Target indikator	Realisasi Indikator	Capaian (%)
2	3	4	5=(4/3)*100	6	7	8	9	10	11=(10/9)*100
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN									
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	39.539.996.020,00	18.054.225.260,00	45,66%	56,74%	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	%	50	50	100,00%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	416.104.354,00	57.615.000,00	13,85%	44,43%	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	2	2	100,00%

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	163.542.984,00	28.855.000,00	17,64%	32,98%	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	2	100,00%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14.475.000,00	3.825.000,00	26,42%	56,30%	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	-	-	0,00%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	238.086.370,00	24.935.000,00	10,47%	44,00%	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	-	-	0,00%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	19.303.563.795,00	8.753.557.824,00	45,35%	62,58%	Jumlah dokumen dokumen adminstrasi keuangan	Dokumen	6	6	100,00%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	19.245.095.795,00	8.721.012.824,00	45,32%	58,37%	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	-	-	0,00%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	58.468.000,00	32.545.000,00	55,66%	66,79%	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	-	-	0,00%
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	24.777.000,00	6.660.000,00	26,88%	33,58%	Jumlah dokumen dokumen Barang Milik Daerah	Dokumen	-	-	0,00%
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	24.777.000,00	6.660.000,00	26,88%	33,58%	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	-	-	0,00%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.318.846.380,00	97.350.000,00	7,38%	7,96%	Jumlah dokumen Pembinaan Pegawai	Dokumen	-	-	0,00%
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1.318.846.380,00	97.350.000,00	7,38%	7,96%	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	-	-	0,00%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.631.192.071,00	1.775.862.585,00	67,49%	70,13%	Jumlah dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen	-	-	0,00%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	49.988.850,00	44.779.000,00	89,58%	100,00%	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100,00%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.453.738.524,00	1.315.710.440,00	90,51%	94,95%	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100,00%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	165.259.175,00	149.023.545,00	90,18%	100,00%	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100,00%
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	155.112.522,00	58.959.600,00	38,01%	46,49%	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	100,00%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	145.365.000,00	59.145.000,00	40,69%	45,23%	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	6	6	100,00%
Fasilitasi Kunjungan Tamu	199.320.000,00	93.865.000,00	47,09%	52,64%	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	6	6	100,00%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	462.408.000,00	54.380.000,00	11,76%	51,57%	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	6	6	100,00%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	13.315.029.188,00	6.590.461.856,00	49,50%	55,47%	Jumlah dokumen Jasa Penunjang	Dokumen	-	-	0,00%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	53.592.000,00	13.148.000,00	24,53%	50,00%	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	-	-	0,00%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.446.483.188,00	515.540.856,00	35,64%	49,65%	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	-	-	0,00%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	11.814.954.000,00	6.061.773.000,00	51,31%	66,76%	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	-	-	0,00%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.530.483.232,00	772.717.995,00	30,54%	58,55%	Jumlah dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	-	-	0,00%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas	649.244.000,00	147.652.545,00	22,74%	50,31%	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang	Unit	-	-	0,00%

atau Kendaraan Dinas Jabatan					Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.045.071.732,00	515.400.000,00	49,32%	50,00%	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	-	-	0,00%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	244.787.500,00	52.465.450,00	21,43%	33,90%	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	-	-	0,00%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	393.000.000,00	57.200.000,00	14,55%	100,00%	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	2	100,00%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	198.380.000,00	0	0,00%	0,00%	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	-	-	0,00%
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	72.495.554.883,00	41.017.675.209,00	56,58%	64,50%	Persentase Perlangkapan Jalan	%	-	-	0,00%
					Persentase Penanganan Titik Kemacetan Lalu Lintas	%	-	-	0,00%
					Rasio tingkat keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan	Rasio	-	-	0,00%
					Terminal yang terbangun	Unit	-	-	0,00%
					Tersedianya Jaringan Angkutan yang Beroperasi	Jumlah	-	-	0,00%
Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	679.518.560,00	0	0,00%	4,94%	Tersedianya Dokumen Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Dokumen	-	-	0,00%
Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	602.461.600,00	0	0,00%	4,94%	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Dokumen	-	-	0,00%
Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	77.056.960,00	0	0,00%	0,00%	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Dokumen	-	-	0,00%
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	49.312.688.879,00	28.527.273.548,00	57,85%	73,99%	Tersedianya Perlengkapan Jalan	Jenis	-	-	0,00%
Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	14.919.771.886,00	12.480.572.000,00	83,65%	88,73%	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	Unit	-	-	0,00%
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	2.756.833.713,00	2.347.192.000,00	85,14%	87,80%	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Unit	-	-	0,00%
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	329.507.030,00	98.400.000,00	29,86%	69,65%	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Unit	-	-	0,00%
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	31.306.576.250,00	13.601.109.548,00	43,44%	49,76%	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Unit	-	-	0,00%
Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	26.691.000,00	0	0,00%	0,00%	Terlaksananya pengelolaan terminal penumpang tipe C	Jumlah	-	-	0,00%
Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	26.691.000,00	0	0,00%	0,00%	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun	Dokumen	-	-	0,00%
Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	1.361.162.491,00	584.370.280,00	42,93%	47,09%	Tersedia nya titik parkir di tepi jalan umum di wilayah kabupaten Tangerang	Titik	-	-	0,00%
					Tersedia nya titik parkir di tepi jalan umum di wilayah kabupaten Tangerang	Titik	-	-	0,00%
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	1.264.252.491,00	537.330.280,00	42,50%	43,68%	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen	-	-	0,00%
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	96.910.000,00	47.040.000,00	48,54%	50,49%	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	Laporan	-	-	0,00%

Kewenangan Kabupaten/Kota					Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota				
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	1.264.252.491,00	537.330.280,00	42,50%	43,00%	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen	-	-	0,00%
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	96.910.000,00	47.040.000,00	48,54%	50,00%	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	-	-	0,00%
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	5.012.208.843,00	3.018.803.061,00	60,23%	70,87%	Kendaraan Bermotor yang di uji	%	-	-	0,00%
					Kendaraan Bermotor yang di uji	%	-	-	0,00%
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2.747.875.543,00	1.972.012.355,00	71,76%	77,00%	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	Unit	-	-	0,00%
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	156.648.585,00	0	0,00%	0,00%	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	-	-	0,00%
Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	131.250.000,00	0	0,00%	0,00%	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dokumen	-	-	0,00%
Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	114.805.700,00	114.205.700,00	99,48%	100,00%	Jumlah LaporanSosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Laporan	-	-	0,00%
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1.828.263.305,00	924.680.006,00	50,58%	57,60%	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	Unit	-	-	0,00%
Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	33.365.710,00	7.905.000,00	23,69%	48,88%	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Laporan	2	2	100,00%
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2.747.875.543,00	1.972.012.355,00	71,76%	77,00%	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	Unit	-	-	0,00%
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	156.648.585,00	0	0,00%	0,00%	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	-	-	0,00%
Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	131.250.000,00	0	0,00%	0,00%	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dokumen	-	-	0,00%
Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	114.805.700,00	114.205.700,00	99,48%	100,00%	Jumlah LaporanSosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Laporan	-	-	0,00%
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1.828.263.305,00	924.680.006,00	50,58%	57,00%	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	Unit	-	-	0,00%
Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	33.365.710,00	7.905.000,00	23,69%	48,00%	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Laporan	2	2	100,00%
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	9.998.325.060,00	4.730.151.400,00	47,31%	45,24%	Penanganan Titik yang di Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten	Titik	-	-	0,00%
Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas	7.077.670.250,00	3.149.166.400,00	44,49%	49,38%	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian	Laporan	-	-	0,00%

Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota					Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota				
Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	34.484.000,00	8.371.000,00	24,28%	24,28%	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Laporan	-	-	0,00%
Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	2.886.170.810,00	1.572.614.000,00	54,49%	62,05%	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan	Dokumen	-	-	0,00%
Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	115.581.000,00	52.373.000,00	45,31%	46,00%	Tersedianya Dokumen Fasilitasi dan Evaluasi Analisis Dampak Lalu Lintas	Dokumen	-	-	0,00%
Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	115.581.000,00	52.373.000,00	45,31%	46,00%	Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi	Laporan	-	-	0,00%
Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	1.699.811.020,00	988.489.520,00	58,15%	75,73%	Pelaksanaan Audit, Inspeksi, dan Pemantauan Keselamatan LLAJ di Jalan	Laporan	-	-	0,00%
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	51.744.000,00	44.176.000,00	85,37%	85,37%	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Laporan	-	-	0,00%
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	1.542.625.300,00	867.505.800,00	56,24%	66,35%	Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Laporan	-	-	0,00%
Pelaksanaan Pengawasan Melalui Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	105.441.720,00	76.807.720,00	72,84%	75,46%	Jumlah laporan Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Laporan	-	-	0,00%
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	4.147.513.120,00	3.007.030.400,00	72,50%	89,59%	Tersedianya Pelayanan Angkutan Massal	Unit	34	34	100,00%
Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	27.996.260,00	0	0,00%	100,00%	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Laporan	-	-	0,00%
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	4.119.516.860,00	3.007.030.400,00	72,99%	79,18%	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	Unit	34	34	100,00%
Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	142.054.910,00	109.184.000,00	76,86%	88,00%	Kepatuhan Pengurusan Perijinan Angkutan Orang	%	-	-	0,00%
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	142.054.910,00	109.184.000,00	76,86%	88,00%	Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Unit	-	-	0,00%

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

3.1 PROGRAM DAN KEGIATAN

Berbeda dengan periode 2024-2026, sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru yang menyebabkan adanya perbedaan pendekatan perumusan tujuan dan sasaran karena tidak tersedianya visi dan misi Kepala Daerah. Sehingga untuk tetap menjaga keselarasan dengan dokumen perencanaan yang masih berlaku dan menjaga kesinambungan pembangunan antar periode, maka Pemerintah Kabupaten Tangerang merumuskan tema Rencana Pembangunan Daerah 2024-2026 yang mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
2. Peraturan Gubernur Banten Nomor 33 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2023-2026.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2005-2025

Untuk mewujudkan Visi tersebut di atas maka ditetapkan Misi Pemerintah Kabupaten Tangerang sebagai berikut :

1). Mewujudkan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Tangerang yang mandiri, berdaya saing tinggi dan berakhlak mulia;
2). Mewujudkan perekonomian daerah yang maju dan berdaya saing berbasis pada potensi keunggulan lokal;
3). Mewujudkan pelayanan dasar bagi masyarakat secara merata dan proporsional;
4). Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, demokratis dan partisipatif; dan
5). Mewujudkan pembangunan yang terpadu dan serasi dengan pendekatan pengembangan wilayah berbasis ekonomi dan ekologi.

Dinas Perhubungan sebagai OPD pembantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan di bidang perhubungan. Dikaitkan dengan visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Tangerang dalam RPJPD 2005 – 2025 serta urusan pemerintahan yang diselenggarakan, maka fungsi dan tugas Dinas Perhubungan terkait erat dengan pencapaian *Misi ketiga* yaitu: "***Mewujudkan pelayanan dasar bagi masyarakat secara merata dan proporsional"*** .

Pembangunan berkelanjutan dan Pemerataan infrastruktur Secara umum, pemerataan pembangunan antar daerah merupakan arahan untuk menyeimbangkan pembangunan antar wilayah melalui upaya penyebaran kegiatan ekonomi.

Infrastruktur Perhubungan yang terpadu dan merata ke seluruh wilayah Kecamatan merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi karena secara langsung peningkatan infrastruktur yang menghubungkan antara pusat pertumbuhan ekonomi mampu mendorong kelancaran distribusi barang dan jasa, sehingga dapat mengurangi biaya produksi. Dengan demikian ketersediaan infrastruktur akan berpengaruh pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang menyelenggarakan fungsi-fungsi yaitu Penyusunan Rencana Strategis Dinas berdasarkan Rencana Strategis Pemerintah Daerah

Berdasarkan telaah kebijakan Nasional, Propinsi dan Visi Daerah serta pertimbangan usulan masyarakat sebagaimana telah dibahas pada Bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa perumusan program dan kegiatan pada Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang harus mampu untuk mendorong:

1. Terwujudnya pelayanan yang baik, efektif dan efisien di bidang transportasi sehingga memudahkan mobilitas manusia, barang & jasa.
2. Terciptanya iklim kerjasama yang baik dengan pihak penyedia angkutan umum dan masyarakat pengguna jasa transportasi.
3. Tersedianya kualitas dan kuantitas sarana prasarana dan fasilitas transportasi yang layak dan memadai, mampu melayani pengguna jasa.
4. Meningkatnya tertib administrasi perijinan, pengujian kendaraan bermotor dan operasional jalur angkutan umum.
5. Terciptanya sistem kerja yang profesional dan meningkatnya tata kelola administrasi perkantoran yang baik dengan didukung sarana prasarana dan SDM yang berkualitas.

   Secara teknis, Rumusan Renja tahun ini dijabarkan dalam 2 Program, 17 kegiatan, dan 47 Sub-Kegiatan, yang sudah masuk dan terferifikasi pada system SIPD. Tabel.T-C.33 menguraikan Program dan kegiatan dalam Renja Dinas Perhubungan sebaga berikut:

Tabel.T-C.33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Kabupaten Tangerang

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perhubungan

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025 (Tahun Rencana)				CACATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	DINAS PERHUBUNGAN				**113.380.965.776,00**				**169.223.717.319,00**
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**113.380.965.776,00**				**169.223.717.319,00**
2	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**				**82.856.030.626,00**				**113.742.819.454,00**
2.15.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan***		**100 Persen**	**40.885.410.893,00**			**-**	**30.959.267.319,00**
2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	- Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6 dokumen	416.104.354,00		-	-	477.000.000,00
2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Dokumen	163.542.984,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		200.000.000,00

2.15.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	- Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	58.468.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		27.000.000,00
2.15.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	238.086.370,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		250.000.000,00
2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen dokumen adminstrasi keuangan*	- Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 dokumen	19.795.078.668,00		-	-	12.934.267.319,00
2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	- Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	48 Orang/bulan	19.736.610.668,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		12.934.267.319,00
2.15.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD								
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	- Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	58.468.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		27.000.000,00

		Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD							
2.15.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen dokumen Barang Milik Daerah*	- Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	40.000.000,00		-	-	150.000.000,00
2.15.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD								
		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	- Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	24.777.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		150.000.000,00
2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen Pembinaan Pegawai*	- Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	1.318.846.380,00		-	-	300.000.000,00
2.15.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi								
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	- Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24 Orang	1.318.846.380,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		300.000.000,00
2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah*	- Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7 Dokumen	2.631.192.071,00		-	-	2.205.000.000,00
2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								

		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	- Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	49.988.850,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		30.000.000,00
2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	- Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	1.453.738.524,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		500.000.000,00
2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	- Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	165.259.175,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		200.000.000,00
2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	- Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	155.112.522,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		150.000.000,00
2.15.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	- Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	145.365.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		75.000.000,00
2.15.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu								
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	- Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	199.320.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		150.000.000,00

2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	462.408.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		1.100.000.000,00
2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Jasa Penunjang*	- Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6 jenis	14.168.929.188,00		-	-	12.815.000.000,00
2.15.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	53.592.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		15.000.000,00
2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	- Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	1.446.483.188,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		700.000.000,00
2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	- Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Laporan	12.668.854.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		12.100.000.000,00
2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	- Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 jenis	2.530.000.000,00		-	-	2.078.000.000,00

2.15.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	- Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80 Unit	649.244.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		678.000.000,00
2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	- Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80 Unit	1.045.071.732,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		750.000.000,00
2.15.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	- Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	250 Unit	244.787.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		200.000.000,00
2.15.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	- Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Unit	393.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		300.000.000,00
2.15.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	- Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	198.380.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		150.000.000,00
2.15.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	***Persentase Penanganan Titik Kemacetan Lalu Lintas***		**33,33 Persen**	**72.495.554.883,00**			**-**	**138.264.450.000,00**

		Tersedianya Jaringan Angkutan yang Beroperasi		**1 jaringan**					
		Terminal yang terbangun		**1 Terminal**					
		Persentase Perlangkapan Jalan		**58 Persen**					
		Rasio tingkat keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan		**0,3 Angka**					
2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	*Tersedianya Dokumen Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota*	- Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7 dokumen	679.518.560,00		-	-	1.100.000.000,00
2.15.02.2.01.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota								
		Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	- Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6 Dokumen	602.461.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		1.000.000.000,00
2.15.02.2.01.0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota								
		Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	- Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	77.056.960,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		100.000.000,00

2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	*Tersedianya Perlengkapan Jalan*	- Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9 jenis	49.312.688.879,00		-	-	104.633.000.000,00
2.15.02.2.02.0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota								
		Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	- Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	600 Unit	14.919.717.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		9.130.000.000,00
2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota								
		Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	- Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Unit	2.756.833.713,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		6.103.000.000,00
2.15.02.2.02.0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan								
		Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	- Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Unit	329.507.030,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		44.700.000.000,00
2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan								
		Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	- Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	38 Unit	31.306.576.250,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		44.700.000.000,00

2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	*Terlaksananya pengelolaan terminal penumpang tipe C*	- Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 jumlah	26.691.000,00		-	-	200.000.000,00
2.15.02.2.03.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C								
		Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun	- Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	26.691.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		200.000.000,00
2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	*Penanganan Titik yang di Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten*	- Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Titik	9.998.325.060,00		-	-	13.629.050.000,00
2.15.02.2.06.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota								
		Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	- Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9 Laporan	7.077.670.250,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		9.304.050.000,00
2.15.02.2.06.0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota								
		Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	- Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	34.484.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		200.000.000,00
2.15.02.2.06.0016	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas								

		Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan	- Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	2.886.170.810,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		4.125.000.000,00
2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	*Tersedianya Dokumen Fasilitasi dan Evaluasi Analisis Dampak Lalu Lintas*	- Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Dokumen	115.581.000,00		-	-	500.000.000,00
2.15.02.2.07.0006	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin								
		Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi	- Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Laporan	115.581.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		500.000.000,00
2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	*Pelaksanaan Audit, Inspeksi, dan Pemantauan Keselamatan LLAJ di Jalan*	- Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29 Laporan	1.699.811.000,00		-	-	6.617.400.000,00
2.15.02.2.08.0004	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota								
		Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	- Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Laporan	51.744.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		345.000.000,00
2.15.02.2.08.0007	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum								

		Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	- Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11 Laporan	1.542.625.300,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		5.398.400.000,00
2.15.02.2.08.0009	Pelaksanaan Pengawasan Melalui Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor								
		Jumlah laporan Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	- Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7 Laporan	105.441.720,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		874.000.000,00
2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Tersedianya Pelayanan Angkutan Massal*	- Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	32 Unit	4.147.513.120,00		-	-	4.060.000.000,00
2.15.02.2.09.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota								
		Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	- Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	51 Laporan	27.996.260,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		160.000.000,00
2.15.02.2.09.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								
		Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah	- Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	34 Unit	4.119.516.860,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		3.900.000.000,00

		Kabupaten/Kota yang Tersedia							
2.15.02.2.14	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Kepatuhan Pengurusan Perijinan Angkutan Orang*	- Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 persen	142.054.910,00		-	-	155.000.000,00
2.15.02.2.14.0003	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik								
		Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	- Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Unit	142.054.910,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		155.000.000,00
	UPTD PENGELOLA PRASARANA PERHUBUNGAN				**875.000.000,00**				**2.555.000.000,00**
2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	*Tersedia nya titik parkir di tepi jalan umum di wilayah kabupaten Tangerang*	- Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40 titik	1.361.162.491,00		-	-	2.455.000.000,00
2.15.02.2.04.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik								

		Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	- Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Dokumen	1.264.252.491,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		2.820.000.000,00
2.15.02.2.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota								
		Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	96.910.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		100.000.000,00
	UPTD PENGELOLA PRASARANA TEKNIS PERHUBUNGAN				**11.360.521.109,00**				**68.450.000.000,00**
2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	*Kendaraan Bermotor yang di uji*	- Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	69,41 persen	5.012.208.843,00		-	-	4.450.000.000,00
2.15.02.2.05.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor								
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	- Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Unit	2.747.521.109,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		1.200.000.000,00
2.15.02.2.05.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor								

		Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	- Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60 Orang	156.648.585,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		400.000.000,00
2.15.02.2.05.0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor								
		Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	- Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40000 Dokumen	131.250.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		1.200.000.000,00
2.15.02.2.05.0005	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor								
		Jumlah LaporanSosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	- Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	114.805.700,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		100.000.000,00
2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor								
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	- Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8 Unit	1.828.263.305,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		1.500.000.000,00
2.15.02.2.05.0010	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor								
		Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	- Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Laporan	33.365.710,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		50.000.000,00
J U M L A H					**113.380.965.776,00**				**169.223.717.319,00**

BAB IV
PENUTUP

Pada dasarnya seluruh program-program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan suatu upaya Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang dalam mewujudkan visi dan misi yang telah dirumuskan untuk menjamin terwujudnya visi Kabupaten Tangerang.

Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi stakeholders (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Kabupaten Tangerang. Ruang lingkup perencanaan pembangunan di Dinas Perhubungan ini bersifat makro dalam rangka mendukung pencapaian target dan sasaran serta visi dan misi Kabupaten Tangerang secara keseluruhan.

Untuk menjamin keberhasilan implementasi Rencana Startegis (Renstra) dilaksanakan Rencana Kinerja (Renja) PerubahanTahun 2025 atau merupakan tahun Pertama dari periode RPJMD 2024- 2026, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut ini :

A. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Agar pelaksanaan program dan kegiatan dalam Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang Tahun 2025 dapat berjalan dengan baik maka perlu kaidah pelaksanaan yang harus diperhatikan yaitu :

1. Penetapan status hukum naskah perencanaan ini, sehingga implementasinya bersifat mengikat dan konsekuensinya dapat dipertanggungjawabkan ;
2. Pengkomunikasian/sosialisasi rencana strategis ke semua pihak yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi seluruh pihak untuk melaksanakan rencana strategis yang telah dibuat. Sosialisasi ini penting untuk mendukung keberhasilan implementasi renstra ini dan untuk meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di dalam renstra yang sudah dibuat;
3. Pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan oleh seluruh aparat dan komponen *stakeholders* yang terkait dan relevan secara disiplin dalam artian semua aktifitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak boleh menyimpang dari rencana kerja yang sudah ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi. Oleh karena itu perlunya komunikasi dan sosialisasi renstra ke semua pihak untuk memastikan semua pihak berjalan ke arah yang sama sesuai dengan rencana strategis yang telah dibuat;
4. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di rencana kerja ini secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana kerja yang telah dibuat;
5. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian

terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana kerja untuk menjamin pencapaian visi dan misi organisasi.

B. Rencana Tindak Lanjut

Adapun tindak lanjut yang perlu diperbaiki dalam penyusunan Renja Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang tahun 2025, hal ini untuk menjadi perhatian yang diharapkan tidak terulang Kembali pada penyusunan Renja di tahun selanjutnya:

1. Perlu adanya Kerjasama yang baik antara unsur eksekutif dan Legislatif dalam memberikan data maupun informasi yang di perlukan, agar penyusunan Renja dapat berjalan lancer.
2. Perlu adanya saran dan kritik yang membangun dalam merumuskan Program/Kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang agar dalam pelaksanaan Program/Kegiatan di tahun selanjutnya tercapai dengan baik. Program dan Kegiatan yang disusun dalam Renja ini merupakan Program dan Kegiatan yang bersifat indikatif, sehingga dalam pelaksanaannya akan sangat tergantung pada kondisi, regulasi, prioritas, dan ketersediaan anggaran Pemerintah Daerah pada tahun anggaran bersangkutan.

Dalam pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang pada APBDP Tahun 2025, dimungkinkan terjadi perkembangan dan dinamika Pembangunan yang harus diakomodir.

Demikian rencana kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang pada APBDP Tahun 2025 disusun untuk dapat dipergunakan sebagai pedoman dan penentuan dalam mengambil langkahlangkah pelaksanaan.

24. Dinas Komunikasi dan Informatika

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pembangunan nasional yang sedang dilaksanakan pada dasarnya hanya akan berhasil jika pembangunan daerah sebagai sub sistem dari rangkaian pelaksanaan pembangunan nasional dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah daerah secara berencana, bertahap dan berkesinambungan sesuai dengan kondisi, potensi dan aaspirasi masyarakat yang timbul dan berkembang di daerahnya. Untuk itu, sebagai konsekuensi memasuki otonomi daerah, dimana pada saat yang sama dibarengi adanya perkembangan arus globalisasi yang begitu pesat merupakan peluang sekaligus tantangan bagi Kabupaten Tangerang yang memiliki keanekaragaman sosial, budaya, sumber daya maupun kemampuan yang berbeda untuk mengembangkan potensi yang dimiliki guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Tangerang.

Kabupaten Tangerang merupakan pelaksana otonomi daerah dimana berfungsi sebagai pusat pemerintahan dan pembangunan, maka arus informasi yang cepat dalam berbagai kegiatan sangatlah diperlukan. Untuk mendukung hal tersebut perlu diciptakan sinergi yang lebih bersifat partisipatif dengan memanfaatkan peranan teknologi informasi dan komunikasi yang dapat mengakses informasi juga sekaligus sebagai sarana komunikasi interaktif 3 (tiga) komponen utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yakni: pemerintah, maysarakat dan sektor swasta dalam rangka mewujudkan *Good Governance* sesuai tuntutan reformasi.

Berdasarkan amanat Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, setiap SKPD diharuskan untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) sebagai acuan perencanaan kegiatan Perangkat Daerah untuk kurun waktu satu tahun. Penyusunan Renja PD ini mengacu pada Rancangan Awal RKPD, renstra PD, serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi serta mendasarkan kegiatan pada usulan masyarakat.

Proses Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi. Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan :

1. Persiapan Penyusunan, meliputi: (a) Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah (b) Orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah; (c) Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan (d) Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.
2. Penyusunan Rancangan Awal, Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi

hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah mencakup: (a) Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah dan (b) Hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu.

3. Penyusunan Rancangan, Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah. Rancangan Renja Perangkat Daerah tersebut dibahas dan disempurnakan dalam forum perangkat Daerah/lintas perangkat Daerah dan sudah harus selaras dengan rancangan awal RKPD
4. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dilaksanakan oleh kepala Perangkat Daerah berkoordinasi dengan BAPPEDA Kabupaten Tangerang dan dilakukan pembahasan dengan pemangku kepentingan yang bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Perangkat Daerah.
5. Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah, merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Perkada tentang RKPD. Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD.
6. Penetapan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang menyampaikan seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada. Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Perkada menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

Dalam memenuhi tanggung jawab tersebut diatas Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Tangerang menyusun Rencana Kerja (RENJA) tahunan yang merupakan turunan dari dokumen perencanaan jangka panjang yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah (RPJM) Daerah.

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Tangerang sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2014, tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang ditetapkan sebagai salah satu Dinas di Kabupaten Tangerang. Operasionalisasi pelaksanaan dari tugas pokok dan wewenang Diskominfo tersebut secara teknis diatur dalam Peraturan Bupati Tangerang Nomor 13 Tahun 2023 tentang rincian Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang. Mengacu kepada Peraturan Bupati tersebut, Diskominfo Kabupaten Tangerang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang komunikasi dan informasi, Statistisk dan Persandian sesuai kewenangan dan kebijakan Pemerintah Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Diskominfo mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. perumusan kebijakan bidang Komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian;

b. pelaksanaan kebijakan bidang Komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.2 LANDASAN HUKUM

Renja PD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun berdasarkan beberapa landasan, yaitu mengacu pada:

1. Landasan Idiil Pancasila;
2. Landasan Konstitusional UUD 1945;
3. Landasan Operasional, yaitu:
    a. UU Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
    b. UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah ketiga kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
    c. UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
    d. UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;
    e. UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
    f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
    g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
    h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
    i. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
    j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;
    k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007;
    l. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang;
    m. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 96 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang.
    n. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Kerja Diskominfo Tahun Anggaran 2025, dimaksudkan dan ditujukan untuk:

1. Memberikan acuan bagi PD dalam menyusun program dan kegiatan periode satu tahun yang akan datang;
2. Memberikan acuan bagi PD dalam menyusun indikator kinerja kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang;
3. Memberikan acuan bagi PD dalam kelompok sasaran kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang;
4. Memberikan acuan bagi PD dalam menyusun pagu indikatif dan prakiraan maju kegiatan untuk periode satu tahun pada tahun yang akan datang.
5. Memberikan arah kebijakan tentang gambaran pelaksanaan tugas tugas PD serta indikator atau ukuran keberhasilan/ ketidak tercapaian pada tahun 2024

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Susunan garis besar isi dokumen Renja PD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang serta sistematika penulisan Renja .

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Pada bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan, selanjutnya dikaitkan dengan target Renstra PD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya, serta analisis kinerja pelayanan, permasalahan/hambatan yang dihadapi serta pemecahan masalah.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Bab ini menjelaskan tentang perumusan tujuan dan sasaran, yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD terhadap kebijakan Pemerintah Kabupaten Tangerang dan sasaran target Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menjelaskan secara komprehensif mengenai rencana kerja dan kebutuhan pendanaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah dalam periode perencanaan.

BAB V. PENUTUP

Bab ini berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran

tidak sesuai dengan kebutuhan; kaidah dan rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Rencana Kerja tahun 2024 Diskominfo terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal. Belanja Operasi merupakan Belanja Pegawai dan Operasional pada Diskominfo, sedangkan Belanja Modal merupakan Belanja yang terdiri dari Program SKPD dan Program Wajib Pillihan.

Program tersebut terdiri dari 5 (Lima) Program dan 13 (tiga belas) Kegiatan. Program SKPD terdiri dari 1 (satu) Program dan 8 (Depalan) Kegiatan. Program SKPD merupakan program pada sekretariat Diskominfo. Untuk program wajib pilihan terdiri dari 4 (Empat) Program dan 5 (Lima) kegiatan. Program Wajib Pilihan merupakan program dan kegiatan yang berada pada bidang-bidang Diskominfo.

Pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Realisasi Anggaran Tahun 2024

SASARAN / PROGRAM		Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)	Ket
1.	**Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah**	**37.450.114.906**	**36.236.249.304**	**96,76**	
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	37.450.114.906	36.236.249.304	96,76	
2.	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	314.849.030	306.821.030	97,45	
3.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.731.471.977	12.203.665.259	95,85	
4.	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	8.000.000	8.000.000	100,00	
5.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	867.017.050	823.523.500	94,98	
6.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.219.539.500	1.193.702.895	97,88	
7.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	20.276.656.925	19.798.478.710	97,64	
8.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.111.108.500	1.064.630.926	16,98	
9.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	921.471.924	837.426.984	90,88	
2.	**Optimalnya Layanan Informasi Publik**	**11.944.781.100**	**11.696.222.452**	**97,92**	
1.	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	11.944.781.100	11.696.222.452	97,92	
2.	Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	11.944.781.100	11.696.222.452	97,92	
3.	**Optimalnya Tata Kelola Teknologi Informasi**	**55.190.913.780**	**54.978.379.140**	**99,61**	

SASARAN / PROGRAM		Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)	Ket
1.	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	55.190.913.780	54.978.379.140	99,61	
1.	Pengelolaan Nama Domain Yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat Dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	12.000.000.000	12.000.000.000	100,00	
2.	Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	43.190.913.780	42.978.379.140	99,51	
4.	**Optimalnya Tata Kelola Keamanan Informasi**	**17.107.902.710**	**16.511.335.760**	**96,51 %**	
1.	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	17.107.902.710	16.511.335.760	96,51%	
1.	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	17.107.902.710	16.511.335.760	96,51%	
5.	**Optimalnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral**	**1.488.331.340**	**1.421.609.140**	**95,52 %**	
1.	Program statistik sektoral	1.488.331.340	1.421.609.140	95,52%	
2.	Penyelenggaraan statistic sektoral di linkup pemerintah daerah kabupaten/kota	1.488.331.340	1.421.609.140	95,52%	
TOTAL BELANJA		**123.182.043.836**	**120.843.795.796**	98,10%	

Pada Tahun Anggaran 2024, total alokasi belanja untuk Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang sebesar Rp123.182.043.836, dengan realisasi sampai saat ini mencapai Rp120.843.795.796 atau sekitar 98,10% dari total anggaran.

Tingkat realisasi yang tinggi ini menunjukkan kinerja pelaksanaan anggaran yang sangat baik, mencerminkan efektivitas dalam perencanaan, pelaksanaan program, serta pengelolaan keuangan. Capaian ini juga mengindikasikan bahwa sebagian besar program dan kegiatan strategis yang direncanakan telah berhasil dilaksanakan secara optimal sesuai dengan target.

Tabel 2.2 Raport Kinerja Tahun 2024

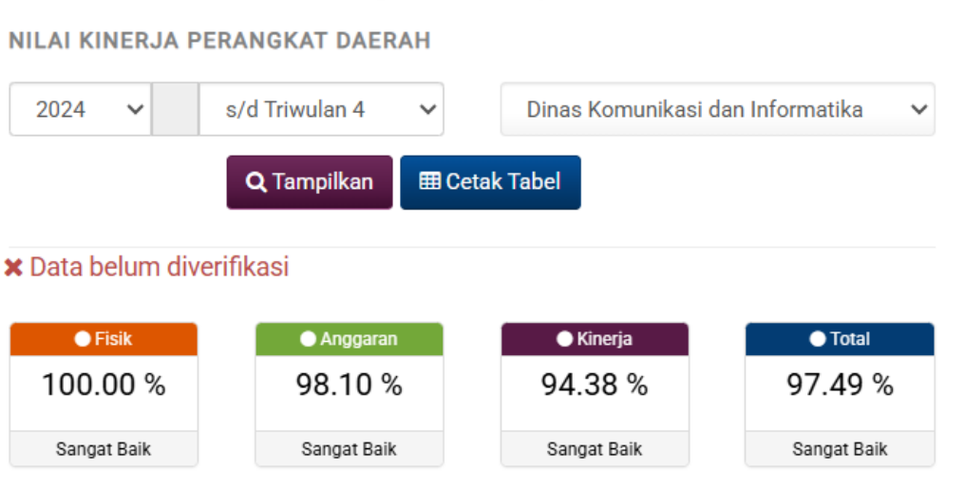

Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang sampai dengan Triwulan IV Tahun Anggaran 2024, diperoleh capaian kinerja dengan predikat “Sangat Baik” pada seluruh komponen evaluasi. Adapun capaian tersebut dirinci sebagai berikut:

Capaian Fisik: sebesar 100,00%, menunjukkan bahwa seluruh kegiatan telah dilaksanakan secara penuh sesuai rencana.

Realisasi Anggaran: sebesar 98,10%, mencerminkan efektivitas tinggi dalam pemanfaatan anggaran serta efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Capaian Kinerja: sebesar 94,38%, menggambarkan keberhasilan perangkat daerah dalam mencapai target-target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Nilai Total Kinerja: sebesar 97,49%, menunjukkan kinerja keseluruhan Diskominfo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berjalan optimal.

Secara substantif sudah dapat dijadikan indikator awal atas keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan di tahun berjalan. Keberhasilan ini mencerminkan kesesuaian antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan yang terintegrasi dengan baik, serta komitmen perangkat daerah dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Tabel 2.3 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika s/d Tahun 2024 Kabupaten Tangerang

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan 2024 (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Prosentase layanan ketebukaan daftar informasi publik	100	88	100	97,87	97,87	100	285,87	71,4675
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase layanan ketebukaan daftar informasi publik	93	88	100	97,87	97,87	92	277,87	69,4675
	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Penyediaan Layanan Aplikasi dan layanan internet	100	80	100	100	100	100	280	70
	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase penyediaan layanan internet	100	80	100	100	100	100	280	70
	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase penyediaan layanan aplikasi	100	80	80	80	100	100	260	65

	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK									
	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase statistik sektoral	75	96,44	70	85,59	122,22	60	242,03	60,5075
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase data statistik sektoral	75	96,44	70	85,59	122,22	73	255,03	63,7575
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN									
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	prosentase layanan keamanan informasi	65	45	50	85.59	122.27	55	185,59	46,3975
	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	prosentase layanan keamanan informasi	65	45	50	85.59	122.27	55	185,59	46,3975
	NON URUSAN									
	NON URUSAN									
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	100	100	100	100	100	100	300	75
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	100	100	100	100	100	300	75
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Administrasi Keuangan perangkat daerah	100	100	100	100	100	100	300	75
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100	100	100	100	100	100	300	75

	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	100	100	100	100	100	300	75
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	100	100	100	100	100	300	75
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	100	100	100	100	100	300	75
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	100	100	100	100	300	75
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	100	100	100	100	300	75

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Tangerang berdiri tahun 2015 sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2015, tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang ditetapkan sebagai salah satu Dinas di Kabupaten Tangerang. Operasionalisasi pelaksanaan dari tugas pokok dan wewenang Diskominfo tersebut secara teknis diatur dalam Peraturan Bupati Tangerang Nomor 15 Tahun 2015 tentang rincian Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang.

Tahun 2016 Diskominfo mengalami perubahan Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang. Menurut peraturan tersebut Diskominfo menjadi suatu Organisasi Perangkat Daerah Tipe A dengan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian. Dengan adanya perubahan tersebut mengakibatkan Diskominfo memiliki bidang baru, sehingga tugas pokok, fungsi dan tata kerja Diskominfo mengalami perubahan pula dan diatur dalam Peraturan Bupati Tangerang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang.

Mengacu kepada Peraturan Bupati tersebut, Diskominfo Kabupaten Tangerang mempunyai tugas yaitu melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah.

Struktur Oganisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang adalah sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TANGERANG

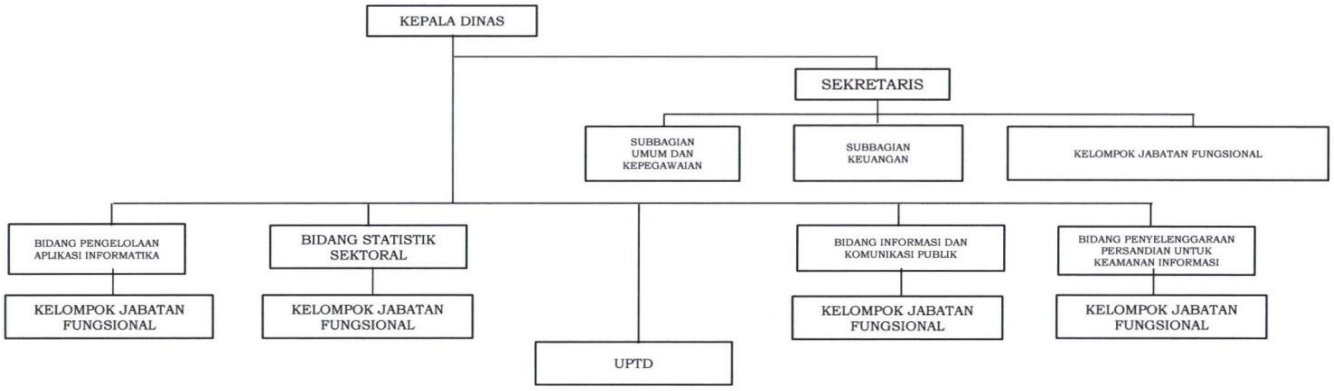

2.2.1 Tugas dan Fungsi

Sesuai struktur organiasasi sebagaimana dimaksud, Diskominfo mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. perumusan kebijakan bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian;
b. pelaksanaan kebijakan bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya;

Dinas Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut :

1. **Kepala Dinas** ;
2. **Sekretaris** ;
   a. Subag Umum dan Kepegawaian;
   b. Tim Kerja Perencanaan;
   c. Subag Keuangan;
3. **Bidang Pengelolaan aplikasi informatika**;
   a. Tim Kerja Pengembangan dan Integrasi Aplikasi manajemen pemerintahan;
   b. Tim Kerja Pengembangan dan Integrasi Aplikasi layanan publik
   c. Tim Kerja Pemeliharaan dan Implementasi Aplikasi ; dan
   d. Tim Kerja Jaringan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi
4. **Bidang Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi**;
   a. Tim Kerja Tata Kelola Persandian; dan
   b. Tim Kerja Keamanan Informasi dan Persandian.
5. **Bidang Informasi dan Komunikasi**
   a. Tim Kerja Informasi Publik;
   b. Tim Kerja Komunikasi Publik; dan
   c. Tim Kerja Layanan Kemitraan Informasi dan Komunikasi Publik.
6. **Bidang Statistik Sektoral**;
   a. Tim Kerja Pengolahan dan Penyiapan Data Statistik Sektoral; dan
   b. Tim Kerja Evaluasi dan Publikasi Data Statistik Sektoral.
7. **Kelompok Jabatan Fungsional**.

Sedangkan tugas pokok dan fungsi dari masing-masing jabatan tersebut adalah sebagai berikut :

1. **Kepala Dinas** Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas sebagai berikut:

- ❖ Merumuskan program kerja Dinas dalam rangka mendukung melaksanakan fungsi Dinas dan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan peraturan perundang-undangan;
- ❖ Mengkoordinasikan dengan instansi/lembaga lain terkait di bidang komunikasi dan informatika untuk mendukung fungsi Dinas;
- ❖ Membina pegawai di lingkungan Dinas untuk meningkatkan kinerja pegawai;
- ❖ Mengarahkan pelaksanaan program kerja Dinas;
- ❖ Menyelenggarakan program kerja Dinas
- ❖ Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas; dan
- ❖ Melaporkan pelaksanaan hasil program kerja.

2. **Sekretaris Dinas** mempunyai rincian tugas antara lain:
   - ➢ Membagi tugas program yang berkaitan dengan perencanaan, keuangan, serta umum dan kepegawaian;
   - ➢ Mengatur program kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan, keuangan, serta umum dan kepegawaian;dan
   - ➢ Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya

Untuk melaksanakan rincian tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi:

a. Penyiapan rumusan kebijakan yang berkaitan dengan kesekertariatan meliputi perencanaan, umum dan kepegawaian serta keuangan;
b. Penyiapan rencana dan program kerja sekretariat mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c. Penyiapan pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas dan kegiatan yang berkaitan dengan kesekretraiatan meliputi perencanaan, umum dan kepegawaian serta keuangan;
d. Pengawasan kinerja pegawai dan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat Dinas;
e. Penyiapan bimbingan dan pembinaan kepada bawahannya dilingkup kesekretraiatan meliputi perencanaan, umum dan kepegawaian serta keuangan untuk meningkatkan kinerja pegawai;
f. penyiapan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan kesekretariatan meliputi perencanaan, umum dan kepegawaian serta keuangan;

g. Pengelolaan administrasi dinas yang berkaitan dengan kesekretariatan meliputi perencanaan, umum dan kepegawaian serta keuangan;
h. Pelaksanaan fasilitasi Pengelola Informasi dan Dokumen (PPID);dan
i. Penyiapan dan Pelaksanaan pengembangan *e-government.*

Dalam melaksanakan tugas pokoknya Sekretariat dibantu oleh 2 (dua) Sub Bagian, yaitu :

a. Sub Bagian Keuangan, mempunyai rincian tugas antara lain:
   1. Merencanakan kegiatan keuangan Dinas;
   2. Membimbing pelaksanaan kegiatan keuangan meliputi : Pembukuan, Pencairan, Pengajuan Surat Membayar Uang Persediaan, Ganti Uang, Tambahan Uang, LS-Bendaharawan, LS-Pihak Ketiga dan Ganti Uang Nihil, serta Pelaporan Pertanggungjawaban Anggaran;
   3. Membagi tugas pelaksanaan kegiatan Subbag Keuangan meliputi: Pembukuan, Pencairan, Pengajuan Surat Membayar Uang Persediaan, Ganti Uang, Tambahan Uang, LS-Bendahara, LS-Pihak Ketiga dan Ganti Uang Nihil, serta Pelaporan Pertanggungjawaban Anggaran;
   4. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan keuangan;
   5. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Keuangan meliputi : Neraca, Laporan Realisasi (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan catatan atas laporan keuangan (CaLK) dan cash opname; dan
   6. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

b. Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
   1. Membimbing pelaksanaan Kegiatan Umum meliputi: surat menyurat, penggandaan, pengiriman, pengarsipan, tata naskah dinas, Inventarisasi aset dan persediaan, pengadaan, pendistribusian, perjalanan dinas, pemeliharaan barang-barang inventarisasi dinas dan *Stock Opname*;
   2. Membimbing pelaksanaan kegiatan Kepegawaian meliputi: surat menyurat, penggandaan, pengiriman, pengarsipan, tata naskah dinas, Inventarisasi aset dan persediaan, pengadaan, pendistribusian, perjalanan dinas, pemeliharaan barang-barang inventarisasi dinas dan *Stock Opname*;
   3. Membagi tugas pelaksanaan kegiatan kepegawaian meliputi: Mutasi, Kenaikan Pangkat, Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional Tertentu, Kenaikan Gaji Berkala, Data Pegawai, DUPAK, PAK, SKP, DUK, Bezetting Pegawai, Kesejahteraan

Pegawai, Pembinaan Disiplin Pegawai, Pendidikan dan Pelatihan Pegawai dan Pensiun Pegawai;

4. Membagi tugas pelaksanaan kegiatan umum meliputi : surat menyurat, penggandaan, pengiriman, pengarsipan, tata naskah dinas, Inventarisasi aset dan persediaan, pengadaan, pendistribusian, perjalanan dinas, pemeliharaan barang-barang inventarisasi dinas dan *Stock Opname*;
5. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tugas umum dan kepegawaian;
6. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian umum dan kepegawaian; dan
7. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Pengelolaan aplikasi informatika, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas mempunyai tugas pokok penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, melaksanakan pembinaan dan pengendalian bidang pengelolaan aplikasi informatika. Bidang pengelolaan aplikasi informatika mempunyai fungsi dalam melaksanakan tugasnya, antara lain:

1. Penyiapan rumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan aplikasi informatika;
2. Penyiapan rencana dan program kegiatan bidang pengelolaan aplikasi informatika;
3. Penyiapan Pengendalian dan pengawasan Bidang Pengawasan kegiatan bidang pengelolaan aplikasi informatika;
4. Penyiapan Bimbingan teknis pelaksanaan program kegiatan Bidang pengelolaan aplikasi informatika; dan
5. Pengelolaan administrasi Bidang pengelolaan aplikasi informatika.

Dalam melaksanakan fungsi tersebut, Bidang Pengelolaan aplikasi informatika mempunyai rincian tugas:

a. merumuskan program bidang pengelolaan aplikasi informatika sesuai dengan rencana kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
c. memberi petunjuk kepada bawahan dalam melaksanakan program bidang pengelolaan aplikasi informatika sesuai dengan tugas dan fungsinya;
d. mengatur program bidang pengelolaan aplikasi informatika;
e. melakukan koordinasi kerjasama lintas Perangkat Daerah, Pemerintah Daerah, pemerintah pusat, dan nonpemerintah

dalam hal pengolahan data, pengembangan, dan integrasi aplikasi;

f. mengevaluasi kegiatan program dan melaporkan pelaksanaan tugas kegiatan kepada Kepala Dinas; dan
g. melaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

4. **Bidang statistik sektoral**, dipimpin oleh Kepala Bidang yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, melaksanakan pembinaan, dan pengendalian bidang statistik sektoral. Disamping itu Bidang statistik sektoral juga memiliki fungsi dalam melaksanakan tugas pokoknya, yaitu:
   1. penyiapan rumusan kebijakan teknis bidang statistik sektoral;
   2. penyiapan rencana dan program bidang statistik sektoral;
   3. penyiapan pengendalian kegiatan bidang statistik sektoral;
   4. penyiapan bimbingan kegiatan bidang statistik sektoral; dan
   5. pengelolaan administrasi kegiatan bidang statistik sektoral.

Dalam melaksanakan fungsi tersebut diatas Bidang statistik sektoral mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

a. merencanakan perumusan kebijakan program bidang statistik sektoral;
b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
c. memberi petunjuk pelaksananaan program bidang statistik sektoral kepada bawahan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
d. mengatur program bidang statistik sektoral;
e. melaksanakan kerja sama dan koordinasi dengan instansi/lembaga/unit kerja lain terkait dengan data statistik sektoral;
f. melaksanakan penyiapan, pengelolaan, evaluasi, dan publikasi data statistik sektoral;
g. mengevaluasi kegiatan program bidang statistik sektoral;
h. melaporkan pelaksanaan tugas kegiatan bidang statistik sektoral kepada Kepala Dinas; dan
i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

5. ***Bidang Informasi dan Komunikasi Publik***, mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan,

koordinasi, melaksanakan pembinaan, dan pengendalian bidang informasi dan Komunikasi publik.

Selain tugas pokok Bidang Informasi dan Komunikasi Publik juga memiliki fungsi antara lain:

1. Penyiapan rumusan kebijakan teknis bidang informasi dan Komunikasi publik;
2. penyiapan rencana dan program bidang informasi dan Komunikasi publik;
3. penyiapan pengendalian kegiatan bidang informasi dan Komunikasi publik;
4. penyiapan bimbingan kegiatan bidang informasi dan Komunikasi publik; dan
5. pengelolaan administrasi kegiatan bidang informasi dan Komunikasi publik

Untuk mendukung dalam melaksanakan fungsinya, Bidang Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai rincian tugas :

a. merumuskan program bidang informasi publik, Komunikasi publik, dan layanan kemitraan informasi dan Komunikasi publik sesuai rencana kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
b. membagi tugas bawahan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
c. memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
d. mengatur program bidang dan Komunikasi publik;
e. melaksanakan program diseminasi informasi dan Komunikasi publik dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
f. melaksanakan koordinasi kegiatan informasi publik, Komunikasi publik, dan layanan kemitraan informasi dan Komunikasi publik;
g. melaksanakan koordinasi kegiatan kehumasan Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah, serta kemitraan media informasi guna mendukung program kerja Pemerintah Daerah;
h. mengevaluasi kegiatan informasi publik, Komunikasi publik, dan layanan kemitraan informasi dan komunikasi publik;
i. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas; dan
j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya

6. ***Bidang Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi*** mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, melaksanakan pembinaan, dan pengendalian bidang Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi. Selain tugas pokok Bidang Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi memiliki fungsi sebagai berikut:
   1. penyiapan rumusan kebijakan teknis bidang Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi;

2. penyiapan rencana dan program bidang Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi;
3. penyiapan pengendalian kegiatan bidang Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi;
4. penyiapan bimbingan pengendalian kegiatan bidang Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi; dan
5. pengelolaan administrasi kegiatan kegiatan bidang Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi.

Dalam mendukung fungsinya Bidang Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi memiliki rincian tugas sebagai berikut:

a. merencanakan perumusan kebijakan program bidang Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi;
b. membagi tugas program bidang kepada bawahan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
c. mengatur program bidang Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi;
d. mengevaluasi kegiatan program bidang Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi;
e. melaporkan pelaksanaan tugas kegiatan bidang Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi kepada Kepala Dinas; dan
f. melaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

7. ***Kelompok Jabatan Fungsional***, mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan dinas secara profesional sesuai dengan kebutuhan. Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

2.2.2 Sumber Daya Dinas Komunikasi Dan Informatika

A. Sumber Daya Aparatur Dinas Komunikasi Dan Informatika

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang tahun 2024 Triwulan I didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 137 (Seratus Tiga Puluh Tujuh) orang yang terdiri dari 55 orang PNS (Pegawai Negeri Sipil) dengan jenjang pendidikan Program Pasca Sarjana 9 (Sembilan) orang, Program Sarjana 36 (Tiga Puluh Sembilan) orang, Program Diploma III 5 (Lima) orang, Lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas 5 (Lima) orang.

Tabel. 2.3.1 Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	STATUS			JUMLAH
		PNS	TKK	TKS	
	Pasca Sarjana (S2)	9	-	2	11
	Sarjana (S1)	36	-	56	92
	Diploma (D3)	5	-	2	7
	SMA	5	-	22	37
JUMLAH					**137**

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian tahun 2024

Gambar. 2.3.1 Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan

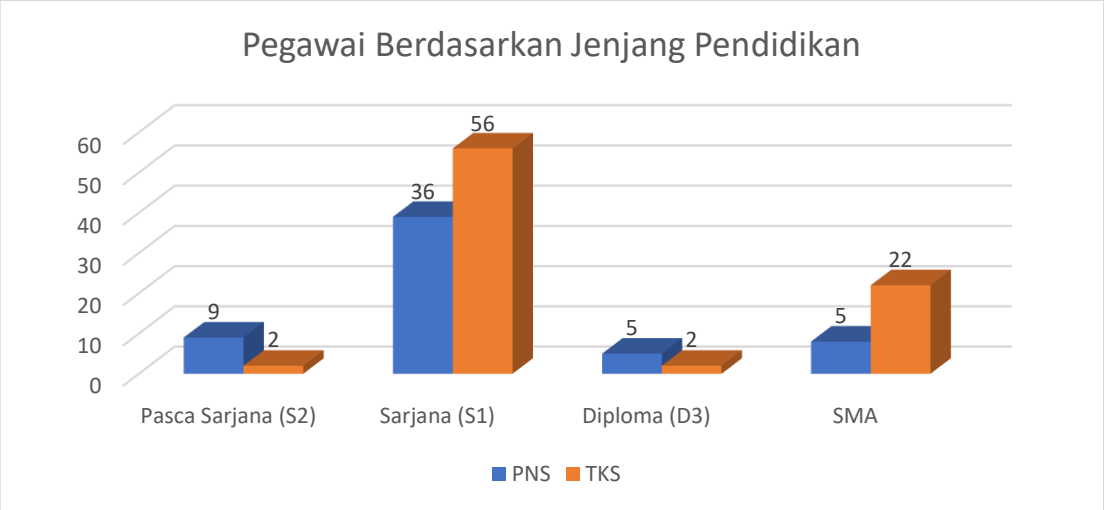

Untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 55(enam puluh satu) orang yang terdiri dari pegawai berjenis kelamin laki-laki sejumlah 39 orang, sedangkan kelamin perempuan sejumlah 22 orang. Komposisi pegawai berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 2.3.2 sebagai berikut

Tabel. 2.3.2 Sebaran Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH	PERSENTASE
	Lak-laki	33	60
	Perempuan	22	40
Jumlah		55	100

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian tahun 2024

Data tabel sebaran PNS berdasarkan jenis kelamin diatas bahwa menunjukkan tentang proporsi laki-laki lebih besar dibandingkan dengan perempuan. Proporsi presentasejumlah PNS berjenis laki-laki sebanyak 60% sedangkan proporsi presentase jumlah

PNS berjenis perempuan sebanyak 40%. Data tersebut ditunjukkan melalui gambar 2.3.2 sebagai berikut:

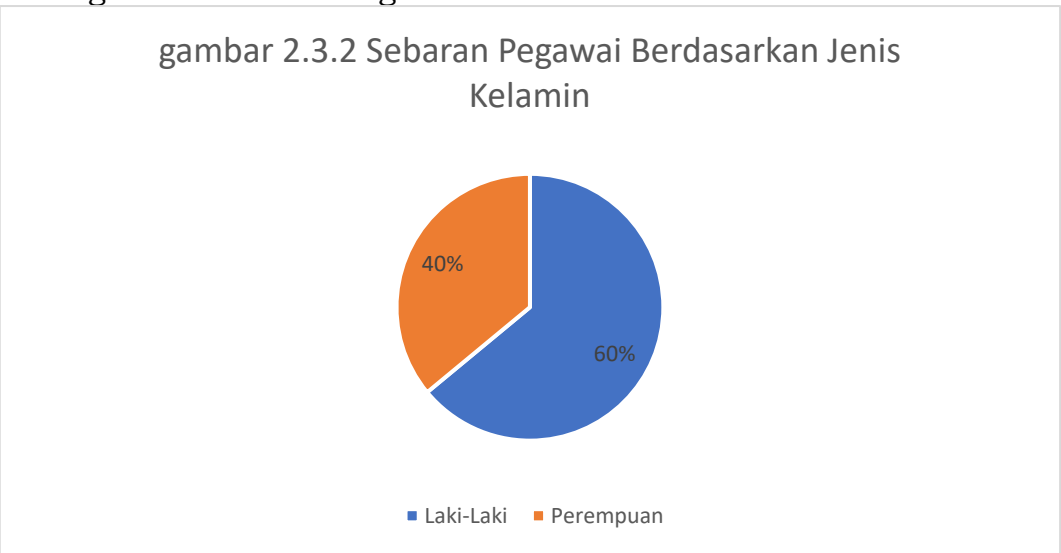

Selain berdasarkan pendidikan personil PNS pada Diskominfo berdasarkan jabatannya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel. 2.3.2 Pegawai Berdasarkan Golongan/Ruang

NO	GOL/ RUANG	PANGKAT	JUMLAH
1	IV/b	Pembina Tk.I	1
2	IV/a	Pembina	5
3	III/d	Penata Tk. I	9
4	III/c	Penata	1
5	III/b	Penata Muda Tk.I	3
6	III/a	Penata Muda	27
7	II/d	Pengatur Tk.i	4
8	II/c	Pengatur	5
JUMLAH			**55**

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian tahun 2024

Kemudian data sebaran PNS pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang berdasarkan umur didominasi oleh golongan umur 31-40 tahun dengan jumlah sebanyak 18 pegawai. Sedangkan dominasi kedua pegawai golongan umur 21-30 tahun sebanyak 16 pegawai, ketiga golongan umur 41-50 tahun sebanyak 11 pegawai, golongan 51-55 tahun sebanyak 6 pegawai, dan golongan umur >56 tahun sebanyak 4 pegawai. Kondisi ini menggambarkan bahwa pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang didominasi oleh pegawai dari kalangan Mileneal yang cenderung cepat, aktif dan melek teknologi, maka akan memungkinkan sangat

berimplikasi positif terhadap kinerja pembangunan komunikasi dan informatika di Kabupaten Tangerang. Data tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.3.3 sebagai berikut:

Tabel.2.3.3 Sebaran PNS Berdasarkan Umur

UMUR	JUMLAH	%
21-30	16	29
31-40	18	33
41-50	11	20
51-55	6	11
>56	4	7

Berdasarkan gambar 2.3.3 berikut dapat diketahui bahwa proporsi persentase sebaran PNS berdasarkan usia sebagai berikut persentase golongan umur persentase golongan umur 21-30 tahun sebesar 29%; 31-40 tahun sebesar 33%; persentase golongan umur 41-50 tahun sebesar 20%, dan persentase golongan umur 51-55 tahun sebesar 11%;dan persentase golongan umur >56 tahun sebesar 7% . Data tersebut dapat dilihat pada gambar 2.3.3 sebagai berikut:

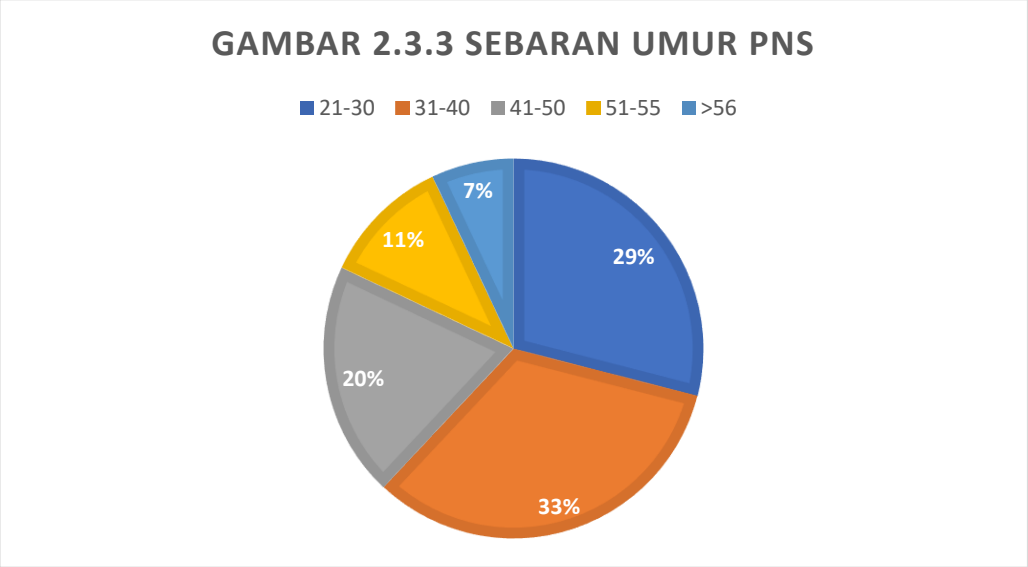

Pelaksana pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel.2.3.4 Pegawai Pelaksana Pada DISKOMINFO

NO	PANGKAT	GOL/ RUANG	PENDIDIKAN	JUMLAH
1	Pembina Tk. I	IV/b	S2	1
2	Pembina	IV/a	S2	5
3	Penata Tk. I	III/d	S2	3
4	Penata Tk. I	III/d	S1	6
5	Penata	III/c	S1	1

NO	PANGKAT	GOL/ RUANG	PENDIDIKAN	JUMLAH
6	Penata Muda Tk. I	III/b	S1	3
7	Penata Muda	III/a	S1	27
8	Penata Muda	III/a	SMA	2
9	Pengatur Tk. I	II/d	SMA	2
10	Pengatur	II/c	D III	5
JUMLAH KESELURUHAN				**55**

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian tahun 2024

Untuk menunjang tugas tersebut maka disusunlah program dan kegiatan yang telah disesuaikan dengan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Diskominfo.

Kajian Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang

NO	Indikator	IKU	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Optimalnya tata kelola teknologi informasi	Indeks Domain Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	2.99	3.05	3.15	3.25	3.37	*3.4	3.45	3.5	
2	Optimalnya layanan informasi publik	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	93.90	94.05	94.30	94.80	97.87	*98	98.1	98.2	
3	Optimalnya tata kelola keamanan informasi	Indeks KAMI (Keamanan Informasi)	Tingkat keamanan informasi pemerintah kabupaten/kota	325	350	375	400	376	*380	385	400	

4	Optimalnya penyelenggaraan statistik sektoral	Persentase Data Statistik Sektoral	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	70	73	75	80	85.59	*87	87.5	88	
5	Meningkatnya nilai akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP	Persentase ASN Pengelola TIK yang tersertifikasi Kompetensi dibawah Pengelolaan Dinas Komunikasi dan Informatika	81	81.5	82	82.5	73.25	*82	82.5	83	

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Teknologi informasi dan komunikasi menjanjikan efisiensi, kecepatan penyampaian informasi, jangkauan yang global dan transparansi. Oleh karena itu dalam era otonomi daerah ini untuk mewujudkan pemerintahan yang good governance. Salah satu upayanya adalah menggunakan teknologi komunikasi dan informasi atau yang populer disebut e-Government. Pelaksanaan e-Government yang telah diimplementasikan harus dapat memenuhi harapan dan kebutuhan dari internal pemerintahan, masyarakat dan pihak swasta.

2.3.1 Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan :

- Regulasi SPBE yang Belum Memadai: Ketiadaan peta rencana dan arsitektur SPBE menghambat integrasi layanan digital antarperangkat daerah.
- Layanan kedaruratan tidak digunakan sesuai fungsi: Banyaknya panggilan prank dan ghosting menunjukkan rendahnya kesadaran serta kurangnya literasi digital masyarakat.
- Penerapan SDI yang Belum Menyeluruh: Produsen data belum seluruhnya menerapkan prinsip SDI, sehingga kualitas statistik sektoral belum optimal.
- Kurangnya Keterbukaan Informasi Publik: Masih ditemukan budaya birokrasi tertutup dan keterbatasan kapasitas dalam memenuhi hak informasi masyarakat.
- Publikasi Pemerintah Kurang Efektif: Strategi komunikasi belum terarah, kurang pemanfaatan media digital, dan minimnya konten yang menarik.

Peluang :

- Transformasi Digital dan Dukungan Regulasi Pusat: Adanya dorongan nasional untuk SPBE dapat dimanfaatkan untuk membangun arsitektur dan peta rencana daerah.
- Kemajuan Teknologi Informasi: Memungkinkan peningkatan pengendalian sistem layanan kedaruratan dan otomatisasi penyaringan panggilan.
- Penguatan Literasi Data dan Informasi Publik: Peluang meningkatkan kualitas SDM melalui pelatihan serta sinergi dengan BPS dan lembaga pusat data.
- Kebutuhan Masyarakat atas Informasi yang Cepat dan Akurat: Mendorong pengembangan sistem informasi publik berbasis digital yang interaktif dan responsif.
- Pemanfaatan Media Sosial dan Digital: Memberikan ruang untuk menyampaikan program pemerintah secara lebih luas dan cepat kepada publik**.**

2.3.2 Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan

Isu Strategis dan Rekomendasi:

- Penguatan Tata Kelola SPBE

Rekomendasi: Segera susun dan tetapkan regulasi teknis berupa peta rencana dan arsitektur SPBE Kabupaten Tangerang.

Catatan Strategis: Libatkan seluruh perangkat daerah dan lakukan sosialisasi menyeluruh untuk memastikan keseragaman penerapan SPBE.

- Optimalisasi Layanan Kedaruratan

Rekomendasi: Lakukan kampanye edukasi masyarakat secara berkala mengenai pentingnya layanan kedaruratan, termasuk penindakan terhadap penyalahgunaan layanan.

Catatan Strategis: Tingkatkan sistem pendeteksi panggilan prank melalui kerja sama dengan operator telekomunikasi.

- Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral

Rekomendasi: Adakan bimbingan teknis dan penyusunan SOP penerapan prinsip SDI bagi seluruh produsen data di lingkup perangkat daerah.

Catatan Strategis: Perlu integrasi dengan data sektoral nasional dan penerapan dashboard data sektoral secara real time.

- Keterbukaan Informasi Publik

Rekomendasi: Bangun sistem permintaan informasi publik berbasis daring dengan fitur tracking dan monitoring permintaan.

Catatan Strategis: Tetapkan indikator kinerja pelayanan informasi publik dalam evaluasi perangkat daerah.

- Perkuatan Strategi Publikasi Pemerintah Daerah

Rekomendasi: Kembangkan strategi komunikasi digital melalui pemanfaatan media sosial, portal berita resmi, dan kemitraan media.

Catatan Strategis: Fokus pada produksi konten visual dan narasi yang lebih menarik serta melibatkan partisipasi publik dalam menyebarluaskan informasi.

Sementara itu permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut:

Permasalahan pelayanan perangkat daerah antara lain:

1. Belum adanya regulasi yang cukup dalam pengelolaan SPBE (peta rencana dan Asitektur)
2. Layanan kedaruratan tidak di manfaatkan oleh masyarakat sesuai dengan fungsinya (masih banyaknya prank dan ghosting panggilan yang dilakukan
3. Penerapan Prinsip SDI pada Penyelenggaraan Statistik Sektoral belum seluruhnya diterapkan oleh Produsen Data
4. Kurangnya keterbukaan Perangkat Daerah sebagai badan publik terhadap kebutuhan akses informasi dari masyarakat
5. Belum optimalnya publikasi pemberitaan Pemerintah Kabupaten Tangerang

Faktor penghambat untuk pencapaian Misi antara lain:

1. Belum Adanya Regulasi yang Cukup dalam Pengelolaan SPBE (Peta Rencana dan Arsitektur)
    i. Kekurangan Kebijakan dan Pedoman: Ketiadaan regulasi yang jelas dan terperinci dapat mengakibatkan kurangnya panduan yang efektif bagi pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Ini dapat menyebabkan ketidakseragaman dalam implementasi dan manajemen SPBE.

ii. Tantangan Koordinasi Antar Sektor: Tanpa regulasi yang kuat, koordinasi antara berbagai sektor dan lembaga menjadi sulit, menghambat integrasi sistem dan berbagi informasi.
iii. Keterbatasan Sumber Daya: Kurangnya sumber daya manusia yang kompeten dan terlatih dalam pengelolaan SPBE bisa menjadi kendala dalam pengembangan arsitektur yang efektif.

2. Layanan Kedaruratan Tidak Dimanfaatkan oleh Masyarakat Sesuai dengan Fungsinya
   i. Kurangnya Edukasi dan Sosialisasi: Masyarakat mungkin tidak sepenuhnya memahami fungsi dan pentingnya layanan kedaruratan, sehingga tidak menggunakannya secara tepat.
   ii. Tingginya Angka Prank dan Ghosting: Banyaknya panggilan tidak valid atau prank mengindikasikan kurangnya kesadaran masyarakat tentang dampak negatif dari tindakan tersebut, mengganggu efisiensi layanan.
   iii. Teknologi dan Sistem Pengendalian yang Terbatas: Sistem pengendalian dan penyaringan panggilan yang kurang efektif dapat memperburuk masalah, menghambat respons cepat terhadap situasi darurat yang nyata.
3. Penerapan Prinsip SDI pada Penyelenggaraan Statistik Sektoral Belum Seluruhnya Diterapkan oleh Produsen Data
   i. Kurangnya Pemahaman dan Pengetahuan: Produsen data mungkin belum sepenuhnya memahami prinsip-prinsip Sistem Data dan Informasi (SDI), sehingga penerapannya tidak konsisten.
   ii. Keterbatasan Teknologi dan Infrastruktur: Keterbatasan dalam teknologi dan infrastruktur yang mendukung penerapan SDI dapat menghambat penyelenggaraan statistik sektoral.
   iii. Resistensi terhadap Perubahan: Beberapa produsen data mungkin menghadapi resistensi internal terhadap perubahan dalam penerapan prinsip SDI, menghambat penerapan yang lebih luas.
4. Kurangnya Keterbukaan Perangkat Daerah sebagai Badan Publik terhadap Kebutuhan Akses Informasi dari Masyarakat
   i. Budaya Birokrasi Tertutup: Budaya birokrasi yang tidak transparan dapat menjadi hambatan utama dalam memberikan akses informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat.
   ii. Keterbatasan Sumber Daya dan Kapasitas: Kurangnya sumber daya dan kapasitas untuk mengelola permintaan informasi publik dapat menghambat keterbukaan.
   iii. Kurangnya Pemahaman tentang Hak Informasi Publik: Beberapa perangkat daerah mungkin tidak sepenuhnya memahami atau menghargai pentingnya hak akses informasi publik.
5. Belum Optimalnya Publikasi Pemberitaan Pemerintah Kabupaten Tangerang
   i. Strategi Komunikasi yang Kurang Efektif: Kurangnya strategi komunikasi yang terencana dan terkoordinasi dapat mengakibatkan pemberitaan yang tidak mencapai audiens target secara efektif.
   ii. Penggunaan Media yang Terbatas: Keterbatasan dalam memanfaatkan berbagai platform media, termasuk media

digital, dapat menghambat jangkauan dan dampak dari publikasi.

iii. Kurangnya Konten Berkualitas: Produksi konten yang kurang relevan atau menarik dapat mengurangi minat masyarakat terhadap informasi dan pemberitaan pemerintah.

Dengan berbagai permasalahan dan hambatan di atas menyebabkan masih belum maksimalnya produk perencanaan dalam mencapai visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs *(Millenium Developmnet Goals)*.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TANGERANG

Telaahan terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2025 dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika dengan hasil pencapaian target tahunan.

Rancangan awal Renja yang telah disusun oleh Dinas Komunikasi dan Informatika telah disesuaikan dengan perencanaan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika. Perencanaan kinerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika yang dilaksanakan melalui kegiatan tahunan. Disamping itu dokumen rencana kinerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan serta indikator kinerja dan rencana capaiannya. Usulan program dan kegiatan dalam Renja Dinas Komunikasi dan Informatika senantiasa diselaraskan dengan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Review Terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 2.3.

Tabel 2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Dinas Komunikasi dan Informatika

RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN			
Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian indikator	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian indikator	Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	100 Persen	14.969.710.390	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	100 Persen	22.096.695.787
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	76.233.300	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	199.555.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangka1t Daerah			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	43.618.000		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	71.065.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	14.494.300		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	24.940.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	18.121.000		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	103.550.000

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	13.042.359.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	13.569.085.087
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	63 Orang/bulan	13.000.000.000		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	63 Orang/bulan	13.555.975.087
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	20 Laporan	42.359.000		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	20 Laporan	13.110.000
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	0 Persen	25.500.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	0 Persen	8.112.000
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD			
	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	25.500.000		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	8.112.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	213.982.400	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	31.096.000
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	15.000.000		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	31.096.000

Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	533.519.730	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	847.080.100
Penyediaan Bahan Logistik Kantor				Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 Paket	0		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 Paket	83.214.100
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	26.008.130		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	8.799.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	12.645.600		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	5.550.000
Fasilitasi Kunjungan Tamu				Fasilitasi Kunjungan Tamu			
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	94.976.000		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	74.400.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	399.890.000		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	675.117.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	470.009.860	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	1.613.995.000

Pengadaan Mebel				Pengadaan Mebel			
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	100 Unit	57.815.000		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	100 Unit	110.115.000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	50 Unit	412.194.860		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	50 Unit	1.503.880.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	124.135.800	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	5.037.276.500
Penyediaan Jasa Surat Menyurat				Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	12.499.800		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	18.000.000,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	0		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	945.582.000
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	111.636.000		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	756.328.500
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			

	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	0		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	3.317.366.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	483.970.300	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	790.496.100
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	18 Unit	448.470.300		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	18 Unit	628.196.100
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	70 Unit	35.500.000		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	70 Unit	162.300.000
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Prosentase layanan ketebukaan daftar informasi publik	100 Persen	10.623.875.000	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Prosentase layanan ketebukaan daftar informasi publik	100 Persen	6.859.027.000
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase layanan ketebukaan daftar informasi publik	92 Persen	10.623.875.000	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase layanan ketebukaan daftar informasi publik	92 Persen	6.859.027.000
Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik				Relasi Media			

	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	6 Dokumen	6.877.000.000		Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. Terverifikasi dewan pers, dan 2. Terdaftar di Dinask Kominfo, dan 3. Aktif dalam kegiatan relasi media	176 Laporan	3.193.730.000
Pengelolaan Media Komunikasi Publik				Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat			
	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	2 Dokumen	1.124.125.000		Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	29 Komunitas	13.508.000
Pelayanan Informasi Publik				Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik			
	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	100 Permohonan	529.000.000		Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika	5 Laporan	18.203.000
Layanan Hubungan Media				Pelayanan Informasi Publik			
	Jumlah Layanan Hubungan Media	3 Layanan	1.587.000.000		Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	100 Permohonan	955.078.800
Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik				Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik			

	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkat Kapasitasnya	100 Orang	396.750.000		Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	12 Rekomendasi	526.751.000
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas				Diseminasi Informasi			
	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	1 Dokumen	110.000.000		Persentase khalayak yang terpapar informasi publik	100 Persentase	702.621.000
				Pengelolaan Media Komunikasi Publik			
					Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	1 Media	16.996.000
				Penyusunan Konten			
					Jumlah Konten Informasi Publik	5 Konten	684.071.600
				Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik			
					Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	140 Orang	748.068.000
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Penyediaan Layanan Aplikasi dan layanan internet	100 Persen	32.874.629.893	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Presentase Penyediaan Laporan Aplikasi dan Layanan Internet	100 Persen	32.093.957.688

Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase penyediaan layanan internet	100 Persen	155.000.000	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	jumlah laporan pengelolaan nama domain dan sub domain	1 Laporan	152.320.000
Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah				Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa			
	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	70 Unit	155.000.000		Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	1 Dokumen	152.320.000
Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase penyediaan layanan aplikasi	100 Persen	32.719.629.893	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengelolaan e-government	1 Laporan	31.941.637.688
Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda			
	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	73 Dokumen	143.775.581		Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	1 Laporan	509.940.000
Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah				Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah			
	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	70 Unit	1.360.562.873		Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional	1 Dokumen	7.624.400.000
Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik				Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah			

	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	25 Unit	502.389.025		Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	25 Aplikasi	1.307.280.000
Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas				Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas			
	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	48 Dokumen	1.857.260.366		Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas	63 unit	602.540.000
Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah				Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota			
	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	3 Dokumen	28.855.642.048		Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	88 Perangkat Daerah	10.800.000.000
				Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBEdan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE			
					Jumlah dokumen koordinasi Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	1 Dokumen	489.000.000
				Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE			
					Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	88 Perangkat Daerah	10.608.477.688
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK			1.256.375.000	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK			1.733.233.200

PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase statistik sektoral	75 Persen	1.256.375.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase statistik sektoral	75 Persen	1.733.233.200
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase data statistik	80 Persen	1.256.375.000	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Laporan penyelenggaraan Statistik sektoral	1 Laporan	1.733.233.200
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral				Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional			
	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	1 Dokumen	661.250.000		Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan	100 Persentase	423.819.000
Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi				Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia			
	Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	70 Orang	165.312.500		Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	8 Dokumen	216.070.100
Membangun Metadata Statistik Sektoral				Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral			
	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	1 Dokumen	330.625.000		Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu	75 Persentase	368.233.100
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral				Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral			
	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	70 Orang	99.187.500		Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	80 Orang	681.452.000
Pengembangan Infrastruktur				Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar			
	Jumlah Infrastruktur Statistik	15 Unit	0		Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik	8 Dokumen	43.659.000

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN			
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Prosentase layanan keamanan informasi	55 Persen	1.348.950.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Prosentase layanan keamanan informasi	65 Persen	11.843.079.376
Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase layanan keamanan informasi	55 Persen	1.348.950.000	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi	1 Laporan	11.843.079.376
Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	2 Dokumen	330.625.000		Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	2 Dokumen	95.600.000
Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	264.500.000		Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	421.172.000
Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik				Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik			
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 Laporan	290.950.000		Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	2 Laporan	10.122.630.000

Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	70 Perangkat Daerah	462.875.000		Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	63 Perangkat Daerah	233.658.000

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang dalam pembuatan program kegiatan dengan memperhatikan usulan-usulan program dan kegiatan yang diusulkan oleh para pemangku kepentingan serta memperhatikan masukan atau saran dari masyarakat, baik disampaikan secara langsung melaui Musrenbang, maupun secara tertulis.

Tabel T-C.32

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun ... Kabupaten Tangerang

Nama Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Dalam rangka menciptakan masyarakat informasi yang sejahtera, berbudaya, dan berbasis pengetahuan, diperlukan arah pembangunan yang jelas di bidang komunikasi dan informatika. Informasi yang dikelola dengan baik akan menghasilkan pengetahuan yang sangat khas bagi suatu negara, sesuai dengan kondisi alam dan budaya, sehingga merupakan aset yang sangat berharga.

- Landasan Kebijakan Nasional

Pembaruan ini mengacu pada agenda pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025—2029. Arah kebijakan ini juga menyesuaikan dengan Nawacita 2025 yang fokus pada pembangunan berkelanjutan, peningkatan daya saing, serta penguatan ekonomi digital sebagai salah satu pilar utama pembangunan nasional.

Selain itu, kebijakan ini mempertimbangkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) global dengan memasukkan elemen-elemen perkembangan teknologi dalam strategi pengelolaan, penyelenggaraan, hingga pemanfaatan di bidang TIK.

- Dampak Pandemi dan Digitalisasi Nasional

Pandemi Covid-19 yang terjadi pada tahun 2020 telah mempercepat kebutuhan digitalisasi nasional. Pada era pasca-pandemi, kebutuhan koneksi internet yang memadai menjadi kebutuhan primer masyarakat. Para pelaku usaha, industri, dan sektor ekonomi terdorong untuk bertransformasi digital agar bisnisnya dapat terus beroperasi. Situasi ini mendorong Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) untuk mempercepat penyediaan infrastruktur TIK dan transformasi digital nasional.

- Fokus Kebijakan Kemenkominfo 2025—2029

Sesuai dengan Fokus Rencana Strategis (Renstra) Kemenkominfo Tahun 2025—2029, kebijakan ini diarahkan untuk mencapai tiga tujuan utama:

1. Percepatan Penyediaan Infrastruktur TIK:
   Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur TIK ke seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah terpencil dan terluar, guna memastikan konektivitas yang merata.
2. Percepatan Transformasi Digital:
   Mendorong transformasi digital dalam tiga kerangka nasional, yaitu industri, pemerintahan, dan masyarakat. Transformasi ini mencakup peningkatan literasi digital, pengembangan ekosistem digital, serta penguatan keamanan siber.
3. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Komunikasi Publik:
   Memperbaiki tata kelola komunikasi publik dengan memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas.

- Peran Pemerintah dalam Masyarakat Informatif

Pemerintah diharapkan berperan aktif dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang informatif. Dengan arah kebijakan yang

tepat, diharapkan bidang komunikasi dan informatika dapat memainkan peran penting dalam transformasi menuju masyarakat berbasis pengetahuan.

- Peran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang

Dalam dokumen Rencana Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang, sasaran yang ingin dicapai mencakup indikator kinerja sasaran dan rencana capaiannya yang mewakili tugas pokok dan fungsi Dinas. Khusus untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan pemanfaatan teknologi informasi, Dinas Komunikasi dan Informatika berupaya memberikan kontribusi melalui:

1. Penyediaan Infrastruktur Komunikasi dan Informatika
   Memastikan ketersediaan infrastruktur yang mendukung transformasi digital di tingkat kabupaten.
2. Pengelolaan Statistik dan Persandian
   Mengelola data dan informasi secara efektif untuk mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data.
3. Peningkatan Literasi Digital
   Meningkatkan kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi digital secara aman dan produktif.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH (PD)

Rencana kerja (Renja) merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari rencana strategis yang disusun. Di dalam proses rencana kerja, Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Tangerang mendefinisikan seluruh sasaran strategis, kebijakan, program dan kegiatan yang akan diimplementasikan dalam satu tahun kegiatan dan dituangkan dalam dokumen rencana kerja.

Pada dokumen rencana kerja dijabarkan dan ditetapkan target kinerja tahunan. Target kinerja ini akan menjadi komitmen untuk mencapainya dalam satu tahun, dan merupakan tolok ukur bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Secara khusus Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang mempunyai tujuan yang diselaraskan dengan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika, yaitu:

1. Membangun budaya kerja yang berorientasi pada hasil dengan meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab pegawai terhadap pencapaian kinerja yang terukur.;
2. Memanfaatkan teknologi informasi untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan interaktivitas layanan informasi publik sehingga dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat;
3. Mengembangkan kebijakan dan standar operasional untuk pengelolaan teknologi informasi yang berkelanjutan dan inovatif;
4. Menerapkan sistem keamanan informasi yang komprehensif, termasuk kebijakan, prosedur, dan teknologi untuk melindungi kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi.
5. Membangun kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan statistik sektoral untuk memastikan data yang dihasilkan relevan dan dapat diandalkan.

Tujuan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika dalam menjalankan tugasnya guna mewujudkan visi

Kepala Daerah terpilih untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima di bidang Komunikasi dan Informatika.

Sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan- tindakan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Sasaran akanmemberikan fokus pada penyusunan kegiatan bersifat spesifik, terinci dapat diukur dan dapat dicapai.

Berikut ini adalah sasaran Rencana Kerja tahun 2025, antara lain:

1. Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah;
2. Optimalnya Layanan Informasi Publik;
3. Optimalnya Tata Kelola Teknologi Informasi;
4. Optimalnya Tata Kelola Keamanan Informasi; dan
5. Optimalnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral.

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Faktor-faktor yang menjadi bahan rumusan pada rencana kerja tahun 2025 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang berkaitan dengan pencapaian sasaran strategis yang terdapat dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang 2024 – 2026.

Adapun program dan kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan Dinas Kominfo pada tahun 2025 terdiri dari 5 (Lima) Program dan 13 (Tiga belas) Kegiatan dan 46 (Empat Puluh Enam) Sub Kegiatan. Selanjutnya pada program, kegiatan dan sub kegiatan haruslah memiliki alat ukur yang jelas dan dibuat guna menilai tingkat keberhasilan dan kegagalan pada suatu program dan kegiatan yang disebut dengan indikator kinerja. Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan dari suatu program dan kegiatan baik secara kualitatif (tolak ukur) maupun kuantitatif (target kinerja) yang secara khusus dinyatakan sebagai bentuk pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat pemantauan atau evaluasi.

Adapun program dan kegiatan yang direncanakan berdasarkan sasaran Renja pada tahun 2025, adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

i. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   a. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   b. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

ii. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
   a. Penyediaan jasa surat menyurat
   b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

iii. Administrasi Umum Perangkat Daerah
   a. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
   b. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
   c. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
   d. Fasilitasi Kunjungan Tamu
   e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

iv. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

v. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
   a. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD

vi. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
   a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
   b. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

vii. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
   a. Penyediaan jasa pemeliharan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
   b. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya

viii. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   a. Pengadaan Mebel
   b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

2. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

i. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi
   a. Relasi Media
   b. Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat
   c. Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
   d. Pelayanan Informasi Publik
   e. Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik
   f. Diseminasi Informasi
   g. Pengelolaan Media Komunikasi Publik
   h. Penyusunan Konten

i. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik

3. Program Aplikasi Informatika

i. Pengelolaan e-Government Di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
   a. Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda
   b. Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah
   c. Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah
   d. Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas
   e. Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota
   f. Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBEdan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE
   g. Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE

ii. Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain di lingkup pemerintah daerah kabupaten/kota
   a. Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah

4. Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi

i. Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota
   a. Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
   b. Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota
   c. Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
   d. Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

5. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

i. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
   a. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral
   b. Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional
   c. Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral
   d. Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam menghadapi era globalisasi saat ini Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai pelayan publik harus memberikan pelayanan mutu yang cepat, tepat dan terpadu, serta berperan penting dalam memenuhi tuntutan masyarakat akan adanya akses informasi yang cepat, akurat dan mudah dijangkau. Selain itu juga harus mempersiapkan kerangka acuan pengembangan penyelenggaraan pemerintahan secara elektronik (e-Government) untuk menuju implementasi konsep smart city di Kabupaten Tangerang. Serta mendukung penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam tata kelola pemerintahan yang saat ini bukan lagi menjadi suatu pilihan tetapi sudah menjadi suatu keharusan, maka tidak dapat dipungkiri bahwa penggunaan TIK mampu menjadi pendukung dalam kegiatan pemerintahan baik dalam kegiatan administrasi pemerintahan maupun pelayanan publik yang diharapkan mampu meningkatkan efektifitas dan efisiensi layanan pemerintahan Oleh karena itu Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang menetapkan pelaksanaan program dan kegiatan seperti dalam tabel berikut:

Tabel T-C.33.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**								
2	**16**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**								
2	16	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	Kab. Tangerang	100	26.669.483.403	APBD		100	20.808.499.800
2	16	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Tangerang	1	136.469.800	APBD		1	135.000.000
2	16	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Tangerang	4	51.309.800	APBD		4	20.000.000
2	16	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Tangerang	4	20.510.000	APBD		4	65.000.000
2	16	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Tangerang	1	64.650.000	APBD		1	50.000.000
2	16	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Administrasi Keuangan perangkat daerah	Kab. Tangerang	1	15.557.100.217	APBD		1	17.015.000.000
2	16	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Tangerang	53	15.543.710.217	APBD		56	17.000.000.000
2	16	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Tangerang	20	13.390.000	APBD		20	15.000.000
2	16	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Tangerang	1	8.112.000	APBD		1	8.112.000

2	16	1	2.03	4	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Tangerang	1	8.112.000	APBD		1	8.112.000
2	16	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Tangerang	1	558.498.600	APBD		1	736.126.800
2	16	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Tangerang	100	558.498.600	APBD		56	236.126.800
2	16	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Tangerang	1	1.037.360.700	APBD		100	500.000.000
2	16	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Tangerang	20	240.865.700	APBD		1	885.000.000
2	16	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Tangerang	12	14.979.000	APBD		20	250.000.000
2	16	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Tangerang	24	5.550.000	APBD		5	35.000.000
2	16	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Tangerang	1	82.775.000	APBD		5	10.000.000
2	16	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Tangerang	1	693.191.000	APBD		1	90.000.000
2	16	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Tangerang	1	3.186.799.000	APBD		1	500.000.000
2	16	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Tangerang	24	1.171.205.000	APBD		1	650.000.000
2	16	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Tangerang	50	2.015.594.000	APBD		25	150.000.000
2	16	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Tangerang	1	5.497.272.470	APBD		50	500.000.000
2	16	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Tangerang	1	18.000.000	APBD		1	5.963.000.000
2	16	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daysa air dan listrik	Kab. Tangerang	1	1.168.134.402	APBD		1	13.000.000
2	16	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Tangerang	1	756.328.500	APBD		1	1.800.000.000
2	16	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Tangerang	1	3.554.809.568	APBD		1	150.000.000

2	16	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Tangerang	1	687.870.616	APBD		1	4.000.000.000
2	16	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Kab. Tangerang	15	489.920.616	APBD		1	1.100.000.000
2	16	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Tangerang	40	197.950.000	APBD		15	500.000.000
2	16	2			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Prosentase layanan ketebukaan daftar informasi publik	Kab. Tangerang	100	6.167.578.200	APBD		40	200.000.000
2	16	2	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyediaan informasi dan komunikasi Publik	Kab. Tangerang	1	6.167.578.200	APBD		1	400.000.000
2	16	2	2.01	14	Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	Kab. Tangerang	176	3.054.006.000	APBD		100	6.168.441.200
2	16	2	2.01	15	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	Kab. Tangerang	29	10.241.000	APBD		10094	6.168.441.200
2	16	2	2.01	16	Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika	Kab. Tangerang	5	14.896.000	APBD		170	3.080.006.000
2	16	2	2.01	17	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	Kab. Tangerang	100	203.668.000	APBD		100	203.668.000
2	16	2	2.01	19	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	Kab. Tangerang	12	494.373.000	APBD		12	494.373.000
2	16	2	2.01	20	Diseminasi Informasi	Prosentase Layanan Keterbukaan Daftar Informasi Publik	Kab. Tangerang	100	349.455.000	APBD		100	349.455.000
2	16	2	2.01	21	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	Kab. Tangerang	1	172.018.000	APBD		1	172.018.000
2	16	2	2.01	23	Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik	Kab. Tangerang	5	1.280.254.000	APBD		5	1.280.254.000
2	16	2	2.01	24	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	Kab. Tangerang	140	588.667.200	APBD		140	588.667.200
2	16	3			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Penyediaan Layanan Aplikasi dan layanan internet	Kab. Tangerang	100	46.991.273.000	APBD		100	46.991.273.000

2	16	3	2.01		Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengelolaan nama domain dan sub domain	Kab. Tangerang	1	82.560.000	APBD			
2	16	3	2.01	4	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	Kab. Tangerang	1	82.560.000	APBD			
2	16	3	2.02		Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengelolaan e-government	Kab. Tangerang	1	46.908.713.000	APBD		1	46.991.273.000
2	16	3	2.02	15	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Kab. Tangerang	1	490.032.000	APBD		1	490.032.000
2	16	3	2.02	16	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional	Kab. Tangerang	1	3.398.461.000	APBD		1	3.481.021.000
2	16	3	2.02	20	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Kab. Tangerang	25	1.343.280.000	APBD		20	1.343.280.000
2	16	3	2.02	23	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas	Kab. Tangerang	63	521.680.000	APBD		1	876.940.000
2	16	3	2.02	24	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Kab. Tangerang	88	28.800.000.000	APBD		80	28.800.000.000
2	16	3	2.02	28	Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBEdan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	Jumlah dokumen koordinasi Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	Kab. Tangerang	1	355.260.000	APBD			
2	16	3	2.02	30	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	Kab. Tangerang	88	12.000.000.000	APBD		26	12.000.000.000
2	**20**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**		Kab. Tangerang						
2	20	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase statistik sektoral	Kab. Tangerang	65	1.386.297.440	APBD		70	1.386.297.440
2	20	2	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Laporan penyelenggaraan Statistik sektoral	Kab. Tangerang	1	1.386.297.440	APBD		1	1.386.297.440
2	20	2	2.01	7	Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	Kab. Tangerang	80	537.876.000	APBD		100	419022600
2	20	2	2.01	8	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan	Kab. Tangerang	100	419.022.600	APBD		100	182.038.340

2	20	2	2.01	9	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu	Kab. Tangerang	75	203.880.500	APBD		100	203.880.500
2	20	2	2.01	10	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	Kab. Tangerang	8	182.038.340	APBD		75	537.876.000
2	20	2	2.01	11	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik	Kab. Tangerang	8	43.480.000	APBD		100	43.480.000
2	**21**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**		Kab. Tangerang						
2	21	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	prosentase layanan kemanan informasi	Kab. Tangerang	65	3.921.218.000	APBD		75	3.921.218.000
2	21	2	2.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Laporan pelaksanaan keamanan informasi	Kab. Tangerang	1	3.921.218.000	APBD		1	3.921.218.000
2	21	2	2.01	1	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	Kab. Tangerang	2	194.545.000	APBD		1	3287831400
2	21	2	2.01	2	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Tangerang	1	317.840.000	APBD		1	317.840.000
2	21	2	2.01	3	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Kab. Tangerang	2	3.287.831.400	APBD		70	121.001.600
2	21	2	2.01	4	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Kab. Tangerang	63	121.001.600	APBD		2	194.545.000

4.1 Pertimbangan dalam Perumusan Program dan Kegiatan

Perumusan program dan kegiatan dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 Kabupaten Tangerang didasarkan pada sejumlah faktor strategis dan kebijakan prioritas, antara lain:

- **Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah**
  Seluruh program diarahkan untuk mendukung pencapaian visi *"Kabupaten Tangerang yang Religius, Cerdas, Sehat dan Sejahtera"*, sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tangerang.
- **Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)**
  Perencanaan kegiatan mengintegrasikan indikator SDGs, dengan penekanan pada sektor pendidikan, pengurangan kemiskinan, akses air bersih dan sanitasi, serta kesetaraan gender dan lingkungan hidup.
- **Pengentasan Kemiskinan**
  Program diarahkan untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat, peningkatan akses terhadap layanan dasar, serta fasilitasi lapangan kerja dan kewirausahaan.
- **Pencapaian Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) serta Standar Pelayanan Minimal (SPM)**
  Penyusunan kegiatan berpedoman pada regulasi nasional dalam rangka menjamin pelayanan publik yang berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat.
- **Pendayagunaan Potensi Ekonomi Daerah**
  Pemerintah Kabupaten Tangerang mengoptimalkan potensi lokal seperti kawasan industri, pertanian, pariwisata, dan UMKM, melalui program-program pemberdayaan ekonomi daerah berbasis digital dan inovasi.
- **Respons terhadap Isu Strategis Daerah**
  Termasuk penanggulangan stunting, pengendalian dampak urbanisasi, penguatan ketahanan pangan, serta peningkatan literasi digital masyarakat.

4.2 Uraian Garis Besar Rekapitulasi Program dan Kegiatan

a. Sifat Penyebaran Lokasi Program dan Kegiatan

- **Program/Kegiatan dengan Penyebaran Luas (Lintas Wilayah):**
  Beberapa program seperti pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, layanan pendidikan dan kesehatan dasar, serta penguatan sistem informasi pemerintahan dilaksanakan di hampir seluruh kecamatan di Kabupaten Tangerang.
- **Program/Kegiatan dengan Lokasi Terfokus:**
  Beberapa kegiatan ditujukan untuk kawasan atau kelompok sasaran tertentu, seperti:
  - Intervensi penanganan stunting di kecamatan prioritas,
  - Revitalisasi kawasan permukiman kumuh,
  - Pengembangan desa wisata unggulan,
  - Penguatan kapasitas pelaku UMKM di wilayah sentra produksi,
  - Digitalisasi layanan publik di area padat penduduk.

b. Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Menurut Sumber Pendanaan

- Total kebutuhan dana untuk pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025 direncanakan sebesar **Rp 85.135.850.043,-**

- Rincian sumber pendanaan meliputi:
    - **APBD Kabupaten Tangerang**: Rp **85.135.850.043,-**
    - **DAK Fisik dan Non Fisik (APBN)**: Rp 0,-
    - **DAU (untuk pelayanan dasar wajib)**: Rp 0,-
    - **Bantuan Keuangan dari Provinsi Banten**: Rp 0,-
    - **Sumber Lain (CSR, Kerja Sama Pihak Ketiga, dan Hibah)**: Rp 0,-

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja tahunan merupakan terjemahan dan operasional yang tercantum dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah (PD) yang berkontribusi untuk pencapaian tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam Rencana Strategis PD. Rencana kerja Perubahan dibuat terkait dengan visi dan misi organisasi untuk memenuhi target kinerja dari program dan kegiatan PD.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun Anggaran 2025 ini juga merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas program kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang selama Tahun Anggaran 2025, dan sebagai pengukur rencana capaian kinerja organisasi yang akan dilaksanakan baik secara tim, individu maupun institusi organisasi dalam 1 (satu) tahun ke depan. Disamping itu, untuk lebih meningkatkan aktivitas dan kreatifitas aparatur dalam pelaksanaan disiplin.

5.1 Catatan Penting yang Perlu Mendapat Perhatian

Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025, terdapat beberapa catatan penting yang perlu menjadi perhatian, terutama apabila terjadi ketidaksesuaian antara kebutuhan riil dengan ketersediaan anggaran, yaitu:

- **Skala Prioritas Kegiatan**
  Kegiatan yang memiliki dampak langsung terhadap pelayanan publik, pencapaian target SPM, serta mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah harus diutamakan untuk direalisasikan terlebih dahulu.
- **Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Anggaran**
  Seluruh pelaksanaan kegiatan perlu memperhatikan prinsip efisiensi, tanpa mengurangi capaian output dan outcome yang telah direncanakan.
- **Antisipasi Terhadap Perubahan Kebijakan atau Kondisi Darurat**
  Perlu disiapkan langkah-langkah antisipatif jika terjadi penyesuaian kebijakan pusat/daerah, perubahan struktur anggaran, atau kondisi darurat seperti bencana alam atau kedaruratan kesehatan masyarakat.
- **Penguatan Kolaborasi dan Sumber Pendanaan Alternatif**
  Ketika pagu anggaran tidak mencukupi, maka OPD perlu menjajaki kemungkinan kerja sama pendanaan melalui CSR, skema KPBU, atau kerja sama antarinstansi untuk mendukung kegiatan strategis.

5.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025 mengacu pada kaidah-kaidah berikut:

- **Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan**
  Seluruh tahapan pelaksanaan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pelaporan, wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik di tingkat pusat maupun daerah.
- **Transparansi dan Akuntabilitas**
  Pelaksanaan kegiatan harus didukung oleh sistem pelaporan yang terbuka, dapat dipertanggungjawabkan, dan terdokumentasi dengan baik.

- **Berbasis Data dan Bukti**
  Perencanaan dan pengambilan keputusan dalam pelaksanaan kegiatan dilakukan berdasarkan data yang valid dan analisis kebutuhan yang jelas.
- **Partisipatif dan Kolaboratif**

Pelaksanaan kegiatan mendorong keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, dunia usaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan dan pengawasan program.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Untuk memastikan program dan kegiatan Tahun 2025 dapat dilaksanakan dengan optimal, maka disusun rencana tindak lanjut sebagai berikut:

- **Penyusunan Rencana Kerja dan Rencana Aksi OPD Secara Detail**
  Setelah penetapan Renja, masing-masing bidang/unit kerja akan menyusun rencana aksi terperinci, lengkap dengan indikator kinerja, penanggung jawab, dan jadwal pelaksanaan.
- **Koordinasi dengan Perangkat Daerah Terkait**
  Pelaksanaan kegiatan lintas sektor memerlukan sinergi dengan OPD lain serta stakeholder terkait untuk menghindari tumpang tindih program dan meningkatkan efisiensi pelaksanaan.
- **Penguatan Monitoring dan Evaluasi Secara Berkala**
  Ditetapkan mekanisme monev triwulanan dan tahunan untuk memastikan bahwa kegiatan berjalan sesuai target dan dapat dievaluasi secara objektif.
- **Peningkatan Kapasitas SDM dan Infrastruktur Penunjang**
  Dilakukan pelatihan teknis dan penguatan kelembagaan internal, serta penyediaan infrastruktur pendukung berbasis teknologi informasi agar pelaksanaan kegiatan lebih efektif dan modern.

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2025 sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Tangerang dan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024 – 2026. Dalam dokumen ini memuat program dan kegiatan-kegiatan yang disusun secara sinergis dan berkesinambungan dengan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi organisasi.

Output Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang adalah program tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta sasaran yang telah ditentukan. Renja ini disusun sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2025 yang telah disesuaikan dengan pagu indikatif. Dengan adanya Renja Perubahan ini pelaksanaan anggaran diharapkan dapat memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang, sehingga perencanaan dan penganggaran yang dibuat dapat berhasil dan berdaya guna bagi pembangunan Kabupaten Tangerang.

25. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan program/ kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tangerang telah memasuki triwulan kedua tahun 2025, realisasi hasil perencanaan baik fisik maupun keuangan sudah dapat menjadi bahan evaluasi dan bahan pertimbangan untuk melakukan penyesuaian dan perubahan sehubungan dengan pencapaian target dan sasaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tangerang.

Perubahan dan penyesuaian terhadap perencanaan perlu dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan masing masing program dan kegiatan hingga akhir tahun tidak mengalami kendala yang belum diperkirakan saat penyusunan anggaran. Disamping itu perubahan RKPD menjadi acuan dan pedoman perubahan renja pada dasarnya sub ordinary kebijakan pemerintah sehingga perubahan dan penyesuaian perencanaan juga dapat atau perlu dilakukan jika terdapat kebijakan pemerintah yang diterbitkan setelah renja selesai dibuat.

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 tahun 2017 perubahan renja ini adalah perubahan terhadap RKPD yang terkait dengan evaluasi pelaksanaan RKPD tahun berjalan yang menunjukkan perlunya penyesuaian terhadap perkembangan keadaan yang meliputi penyesuaian asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya yang harus digunakan untuk tahun berjalan, penambahan kegiatan baru, perubahan indikator kinerja, target, lokasi dan pagu kegiatan.

Penyusunan perubahan renja tahun 2025 juga diperlukan untuk menjamin konsistensi terhadap pencapaian sasaran renstra dan RPD, khususnya terhadap sasaran dan indikator yang harus dicapai pada tahun 2025. Disamping itu perubahan Renja ini menjadi pedoman penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tangerang.

1.2 Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tangerang Tahun 2024 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
2. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang–Undang Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan

Mikro;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Simpan Pinjam oleh Koperasi (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 19 Tambahan Negara Nomor 3591);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3718);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3743);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan pada Koperasi (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3740);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 517);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 09 Tahun 2013 Tentang Investasi Pemerintah Daerah pada Unit Pengelolaan Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tangerang;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pelayanan, Pengembangan dan Pengelolaan Koperasi dan Usaha Mikro;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 03 tahun 2016 Tentang Pembinaan dan Pemberdayaan Koperasi;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 04 thun 2016 Tentang Peraturan Dagang dan Pengembangan Usaha dan KUD;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang;
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2008 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir Pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK. 05/2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir Pada Kementerian

Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 496);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Dana Bergulir Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2012 Nomor 2);
23. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 30 Tahun 2019 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas dan Badan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2019 Nomor 30);
24. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026;
25. Peraturan Bupati Nomor 26 tahun tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tangerang.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Perubahan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tangerang Tahun 2025 adalah untuk menjamin konsistensi antara perencanaan 2025 dengan penyusunan penganggaran tahun 2025 dan menjamin konsistensi terhadap pencapaian sasaran Renstra, serta dalam rangka menjamin sinergitas pelaksanaan program dan kegiatan serta menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah. Sedangkan Tujuan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tangerang adalah :

1. Mendeskripsikan tentang program – program prioritas yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tangerang;
2. Program–program tersebut dapat terlaksana sesuai yang diharapkan dengan menitikberatkan pada program - program prioritas.
3. Menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan dengan perkembangan kondisi terkini.
4. Memberikan dasar hukum penambahan kegiatan baru, perubahan indikator kinerja, target, lokasi dan pagu kegiatan
5. Menyediakan acuan penyusunan rencana kerja Perubahan dan anggaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tangerang tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA TRIWULAN I TAHUN 2025

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Capaian Indikators s/d Triwulan I Tahun 2025
- 2.2 Analisa Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan

Fungsi SKPD

2.4 Reviu Terhadap Rancangan RKPD Kabupaten Tangerang

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
3.2 Tujuan dan Sasaran
3.3 Program dan Kegiatan
3.4 Perencanaan Kerja dan Pendanaan Perubahan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

BAB IV PENUTUP

BAB II
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Capaian Indikators s/d Triwulan II Tahun 2025

2.1.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Kualitas penyusunan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tangerang yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan Renja diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tangerang.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan/permasalahan yang dihadapi.

Untuk peyusunan Perubahan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tangerang tahun 2025 diperlukan evaluasi hasil capaian sampai dengan triwulan 1 Tahun 2025. Juga disajikan perkiraan capaian target Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tangerang sampai dengan tahun 2024. Pada tahun 2024 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tangerang melaksanakan sebanyak 7 Program dengan rencana anggaran sebagaimana tertuang di dalam APBD sebesar Rp 23.272.663.310,-. Dalam pelaksanaanya program tersebut dapat diselesaikan seluruhnya dengan realisasi anggaran Rp 21.809.061.743,- atau sebesar 93,71.

Tabel 2.1.1
Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Pencapaian Renstra sampai dengan tahun 2024 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tangerang

Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja indikator Kinerja Program (*outcomes*)/Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Realisasi program dan kegiatan (Renja) Perangkat Daerah tahun 2025	Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	
										Target RenjaTahun 2024	Realisasi RenjaTahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d Tahun 2025	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	**17**	**01**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan**	**300%**	**95%**	**100%**	**92,73%**	**93%**	**25%**	**117,73%**	**39,24%**
							Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	**300%**	**95%**	**100%**	**100%**	**100%**	**25%**	**125%**	**41,67%**
2	17	01	2	01		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	100,00%	2 dokumen	2 Dokumen	50,00%
							Persentase Ketersediaan Dokumen perencanaan dan Pelaporan	300%	100%	100%	100%	100,00%	25,00%	125%	41,67%

2	17	01	2	01	00 01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100,00%	1 dokumen	5 dokumen	41,67%
2	17	01	2	01	00 06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100,00%	1 dokumen	3 dokumen	50,00%
2	17	01	2	01	00 07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100,00%	0	2 dokumen	33,33%
2	17	01	2	02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya laporan keuangan	3 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100,00%	1 dokumen	2 dokumen	66,67%
							Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	300%	100%	100%	100%	100,00%	100,00%	200%	66,67%
2	17	01	2	02	00 01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	42 orang/bulan	14 orang/bulan	14 orang/bulan	14 orang/bulan	100,00%	4 orang/bulan	18 orang/bulan	42,86%
2	17	01	2	02	00 07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100,00%	0	1 laporan	33,33%
2	17	01	2	03		Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya laporan Barang Milik Daerah	3 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100,00%	0	1 dokumen	33,33%
							Persentase Ketersediaan Dokumen Laporan Barang Milik Daerah	300%	100%	100%	100%	100,00%	0	100%	33,33%

2	17	01	2	03	00 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100,00%	0	1 dokumen	33,33%
2	17	01	2	05		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang difasilitas	120 orang	40 orang	40 orang	40 orang	100,00%	0	40 orang	33,33%
							Prosentase aparatur yang meningkat kapasitasnya	300%	100%	100%	100%	100,00%	0	100%	33,33%
2	17	01	2	05	00 02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya pakaian dinas dan kelengkapannya	60 orang	40 orang	-	-	-	0	0	00%
2	17	01	2	05	00 09	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	120 orang	10 orang	40 orang	40 orang	100,00%	0	40 orang	100,00%
2	17	01	2	06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	90 jenis	30 jenis	30 jenis	30 jenis	100,00%	12 jenis	42 jenis	100,00%
							Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100,00%	40,00%	140%	35,00%
2	17	01	2	06	00 01	Sub Kegiatan Penyediaan Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	21 paket	7 paket	7 paket	7 paket	100,00%	3 paket	10 paket	47,62%
2	17	01	2	06	00 02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	48 paket	16 paket	16 paket	16 paket	100,00%	10 paket	26 paket	54,17%
2	17	01	2	06	00 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	60 paket	20 paket	20 paket	20 paket	100,00%	20 paket	40 paket	100,00%
2	17	01	2	06	00 04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	90 paket	30 paket	30 paket	30 paket	100,00%	10 paket	40 paket	44,44%

2	17	01	2	06	00 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	30 paket	10 paket	10 paket	10 paket	100,00%	10 paket	20 paket	66,67%
2	17	01	2	06	00 06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	100,00%	1 dokumen	6 dokumen	40,00%
2	17	01	2	06	00 08	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	3 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100,00%	0	1 laporan	33,33%
2	17	01	2	06	00 09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	100,00%	0	2 laporan	33,33%
2	17	01	2	08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang	12 jenis	3 jenis	4 jenis	2 jenis	50,00%	1 jenis	3 laporan	25%
							Persentase pemenuhan Jasa Penunjang	300%	78%	100%	50,00%	50,00%	50,00%	100%	33,33%
2	17	01	2	08	00 01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	100,00%	1 laporan	3 laporan	50,00%
2	17	01	2	08	00 02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6 laporan	1 laporan	2 laporan	-	0,00%	0	0	00%
2	17	01	2	09		Kegiatan :Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	87 jenis	29 jenis	29 jenis	29 jenis	100,00%	10 jenis	39 jenis	44,82%
							Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	300%	100%	100%	100%	100,00%	25,64%	125,64%	41,88%

2	17	01	2	09	00 01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	21 unit	11 unit	11 unit	11 unit	100,00%	3 unit	14 unit	66,67%
2	17	01	2	09	00 02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	17 unit	11 unit	11 unit	10 unit	90,91%	1 unit	12 unit	70,59%
2	17	01	2	09	00 06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21 unit	7 unit	7 unit	7 unit	100,00%	0 unit	7 unit	33,33%
2	17	01	2	09	00 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya Pemeliharaan/rehab gedung kantor	3 Unit	1 unit	1 unit	1 unit	**100,00%**	1 unit	2 Unit	66,67%
2	**17**	**03**				**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	**Persentase update dan jumlah Koperasi aktif yang dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan**	**64,29%**	**65,46%**	**21,43%**	**17,86%**	**83,33%**	**7,5%**	**25,36%**	**39,44%**
2	**17**	**03**	**2**	**01**		Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi aktif yang dilakukan pemeriksaan dan pengawasan.	300 Koperasi	218 koperasi	100 Koperasi	100 Koperasi	100,00%	25 koperasi	125 Koperasi	41,67%
							Persentase update dan jumlah Koperasi aktif yang dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	300%	109%	100,00%	100,00%	100,00%	25,00%	125%	41,67%

2	17	03	2	01	00 01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	-	116 koperasi	-	-	-	-	-	-
2	17	03	2	01	00 02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	-	102 koperasi	-	-	-	-	-	-
2	17	03	2	01	00 03	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	**150 Unit Usaha**	**-**	50 Unit Usaha	50 Unit Usaha	100,00%	25 Koperasi	75 Koperasi	**50,00%**
2	17	03	2	01	00 04	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	**150 Unit Usaha**	**-**	50 Unit Usaha	50 Unit Usaha	100,00%	25 Koperasi	75 Koperasi	**50,00%**
2	**17**	**04**				**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**	**Persentase update dan jumlah Koperasi aktif yang dilakukan penilaian dan pemeringkatan.**	**81,09%**	**30,63**	**27,03%**	**7,14%**	**26,42%**	**0**	**7,14%**	**23,31%**
2	**17**	**04**	**2**	**01**		**Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Koperasi Aktif yang dilakukan Penilaian dan Pemeringkatan Kesehatan.	480 koperasi	102	40 koperasi	40 koperasi	100,00%	0	40 koperasi	8,33%

							Persentase update dan jumlah Koperasi aktif yang dilakukan penilaian dan pemeringkatan.	300%	102	100%	100,00%	100,00%	0	100%	33,33%
2	17	04	2	01	00 01	Sub Kegiatan Pelaksanaan Panilaian KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penilaian dan Pemeringkatan Kinerjanya dan Kesehatan KSP/USP. (Progul)	150 Unit Usaha	60 koperasi	40 koperasi	40 koperasi	100,00%	0	40 koperasi	26,67%
2	17	04	2	01	00 02	Sub Kegiatan Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	-	42 koperasi	-	-	-	-	-	-
2	17	05				**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	**Persentase Jumlah Koperasi berkualitas**	**53,58%**	**-**	**17,86%**	**5,36%**	**30,01%**	**0**	**5,36%**	**10,00%**
2	17	05	2	01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM Koperasi yang mengikuti pendidikan dan latihan perkoperasian	**300 Koperasi**	**-**	130 Koperasi	130 Koperasi	100,00%	**0**	**130 Kopersi**	**43,33%**
2	17	05	2	01	00 01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	**300 Unit Usaha**	**-**	130 Unit Usaha	130 Unit Usaha	100,00%	**0**	**130 Kopersi**	**43,33%**
2	**17**	**06**				**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	**Persentase update dan jumlah Koperasi aktif yang dilakukan Peningkatan Pemberdayaan dan perlindungan Koperasi.**	**80,37%**	**15,02%**	26,79%	35,18%	**134,31%**	**5,36**	**40,45%**	**50,44%**

2	17	06	2	01		Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi Aktif yang dilakukan Peningkatan pemberdayaan dan perlindungan koperasi.	300 koperasi	50 Koperaasi	195 Koperasi	197 Koperasi	101,03%	37	87 koperasi	29,00%
							Persentase update dan jumlah Koperasi aktif yang dilakukan Peningkatan Pemberdayaan dan perlindungan Koperasi.	100%	100%	100%	101%	101,03%	37	137%	45,67%
2	17	06	2	01	00 05	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, AksesPasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha Produktif Koperasi yang Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	300 koperasi	50 koperasi	250 Unit Usaha	252 Unit Usaha	100,80%	37	289 koperasi	96,33%
2	17	07				**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**Prosentase Usaha Mikro yang diberdayakan**	**9,4%**	**21,92%**	2,8%	9,84%	351,43%	0,58%	**3,389%**	**35,96%**
2	17	07	2	01		**Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**	Usaha Mikro yang terfasilitasi legalitas usaha dan mendapat penguatan kewirausahaan	3265 UM	625 UM	2.550 UM	2.550 UM	100,00%	512 UM	3062 UM	93,78%

2	17	07	2	01	00 03	Sub Kegiatan Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Pelaku Usaha Mikro yang difasilitasi PIRT, HALAL, HKI	1290 Unit Usaha	625 UM	1750 Unit Usaha	1750 Unit Usaha	100,00%	335 UM	2085 UM	161.63%
2	17	07	2	01	00 15	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Terfasilitasinya Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan	975 Orang	42 UM	225 Orang	800 Orang	800 Orang	178 UM	978 UM	100,3%
2	17	08				**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	**Persentase Koperasi dan Usaha Mikro yang terfasilitasi Dana Pemerintah melalui UPDB**	6,42	**3 Koperasi**	**2,14%**	**1,43%**	**66,67%**	**0,35%**	**1,78%**	**27,72%**
								57,87%	**3610 UM**	**19,29%**	**27,55%**	**142,82%**	**0,44%**	**27,44**	**27,56%**
							Jumlah Usaha Mikro yang menjalin kemitraan dan pemasaran		**600 UM**	**-**	-	**-**	**-**	**-**	**-**
							Prosentase Usaha Mikro yang Dipromosikan	4,80%	-	**1,40%**	**2,80%**	**200,00%**	0,44%	3,24%	67,08%
2	17	08	2	01		**Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Kecil**	Jumlah Koperasi dan usaha mikro yang terfasilitasi Dana Pemerintah melalui UPDB	36 Koperasi	3 Koperasi	12	8	66,67%	2 Koperasi	10 Koperasi	27,780%
								15000 UM	3610 UM	5000	7141	142,82%	584 UM	7725 UM	51,5%

							Pesentase produk Usaha Mikro yang difasilitasi Promosi	300%	-	100%	100%	100,00%	31,42%	131,42%	43,80%
2	17	08	2	01	00 01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil Dalam Pengembangan Produksi Dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Koperasi yang terfasilitasi Dana Pemerintah Melalui UPDB	-	3 Koperasi	-	-	-	-	-	-
								-	3610 UM	-	-	-	-	-	-
2	17	08	2	01	00 02	Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	36 Koperasi	-	12 Koperasi	8 Koperas	66,67%	2 Koperasi	10 Koperasi	27,780%
								15000 UM	-	5000 UM	7141 UM	142,82%	584 UM	7725 UM	51,5%
2	17	08	2	01	00 06	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	1200 UM	-	700 UM	700 UM	100,00%	110 UM	810 UM	67,5%

Dari Data sebagaimana tabel 2.1 diatas, dapat dijelaskan bahwa indikator Kinerja mengacu pada target indikator Kinerja pada Renstra 2024-2026. Adapun Evaluasi hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2024-2025 sampai dengan Tahun 2025, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten tangerang dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan pada 1 bidang urusan, 7 Program dengan 9 Indikator Kinerja Program, 13 Kegiatan dengan 13 Indikator kinerja kegiatan dan 29 Sub kegiatan dengan 29 Indikator kinerja. Dari 9 Indikator kinerja program, 4 Indikator melampaui target dan terdapat 5 indikator yang tidak mencapai target. Adapun penyebab keberhasilan dan kegagalan capain indicator akan dijabarkan sebagai berikut:

1. Program Pengembangan UMKM memiliki 3 target Indikator kinerja, dengan uraian sebagai berikut:
   a. Indikator Persentase Usaha Mikro yang Dipromosikan memiliki realisasi 2,80% dengan target 1,4% sehingga capaian kinerja mencapai 200%. Capaian yang melebihi target disebabkan adanya penambahan target kinerja yang sebelumnya 350 Usaha Mikro menjadi 700 Usaha Mikro pada saat APBD tahun 2024.
   b. Indikator Persentase Koperasi yang terfasilitasi Dana Pemerintah melalui UPDB memiliki realisasi 1,42%atau 8 koperasi dengan target 2,14% atau 12 koperasi sehingga capaian kinerja adalah 66,36%. Capaian yang kurang dari target yang diperjanjikan disebabkan Masih banyaknya Koperasi yang belum menyusun Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan-Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) sehingga pengajuan pembiayaan koperasi belum dapat direalisasikan. Oleh karena itu, sebagai solusi maka akan dilakukan Koordinasi dengan Bidang Koperasi untuk melakukan Pendampingan dalam Pembuatan Laporan Keuangan Sesuai dengan SAK-ETAP.
   c. Indikator Persentase Usaha Mikro yang terfasilitasi Dana Pemerintah melalui UPDB memiliki realisasi 28,34% atau 7141 Usaha Mikro dengan target 5,95% atau 1500 Usaha Mikro sehingga capaian kinerja adalah 476,30%. Capaian yang melebihi target disebabkan banyaknya pengajuan proposal melalui koperasi serta masih tersedianya dana pokok sehingga tetap dilakukan penyaluran dana permodalan untuk Usaha Mikro.
2. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm) dengan Indikator Persentase Usaha Mikro yang diberdayakan memiliki realisasi 9,84% atau 2550 Usaha Mikro dengan target 2,8% atau 725 Usaha Mikro sehingga capaian kinerja adalah 351,41%. Capaian yang lebih tinggi dari target disebabkan adanya penambahan target kinerja yang sebelumnya 725 Usaha Mikro menjadi 2550 Usaha Mikro pada saat APBD tahun 2024.
3. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi dengan Indikator Persentase update dan jumlah Koperasi aktif yang dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan memiliki realisasi 17,86% atau 100 Koperasi dengan target 21,43% atau 137 Koperasi dari 560 Koperasi aktif sehingga capaian kinerja adalah 83,33%. Capaian yang lebih rendah dari target disebabkan pada saat perencanaan awal di renstra target 137 koperasi turun di renja menjadi 100 koperasi dikarenakan alokasi anggaran diprioritaskan untuk kegiatan pendukung usaha mikro dengan bertambahnya usaha mikro di

tahun 2023 dari 25.198 menjadi 61.064.

4. Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi dengan Indikator Persentase update dan jumlah Koperasi aktif yang dilakukan penilaian dan pemeringkatan memiliki realisasi 7,14% atau 40 Koperasi dengan target 27,03% atau 151 Koperasi dari 560 Koperasi aktif sehingga capaian kinerja adalah 26,42%. Capaian yang lebih rendah dari target disebabkan pada saat perencanaan awal di renstra target 151 koperasi turun di renja menjadi 40 koperasi dikarenakan alokasi anggaran diprioritaskan untuk kegiatan pendukung usaha mikro dengan bertambahnya usaha mikro di tahun 2023 dari 25.198 menjadi 61.064.
5. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian dengan Indikator Persentase Jumlah Koperasi berkualitas memiliki realisasi 5,36% atau 35 Koperasi dengan target 17,86% atau 100 Koperasi dari 560 Koperasi aktif sehingga capaian kinerja adalah 30,01%. Capaian yang lebih rendah dari target disebabkan pada saat perencanaan awal di renstra target 100 koperasi turun di renja menjadi 35 koperasi dikarenakan alokasi anggaran diprioritaskan untuk kegiatan pendukung usaha mikro dengan bertambahnya usaha mikro di tahun 2023 dari 25.198 menjadi 61.064
6. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi dengan Indikator Persentase update dan jumlah Koperasi aktif yang dilakukan Peningkatan Pemberdayaan dan perlindungan Koperasi memiliki realisasi 35,18% atau 197 Koperasi dengan target 26,79% atau 150 Koperasi dari 560 Koperasi aktif sehingga capaian kinerja adalah 131,31%. %. Capaian yang melebihi target disebabkan adanya peningkatan realisasi klinik Koperasi yang awalnya 50 koperasi tetapi yang mendapat layanan klinik koperasi sejumlah 84 koperasi.
7. Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ddengan indikkator Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan memiliki realisasi 92,73% dari target 100%. Hal tersebut dikarenakan terdapat 1 indikator yang tidak diserap/dilaksanakan yaitu “Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik”, Adapun penyebab tidak diserap yaitu pada pelaksanaan pembayaran tagihan internet sudah tidak di lanjutkan dengan pertimbangan bahwa pemakaian internet dari dikominfo sudah sangat memadai untuk mendukung aktifitas kerja di linkungan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro. Sehingga di tahun 2024 realisasi target untuk indicator “Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik”, adalah nihil dan tahun 2025 indikator ini tidak akan dianggarkan lagi.

2.1.2 Evaluasi Kinerja Triwulan II Tahun 2025

Evaluasi adalah perbandingan antara dampak nyata dari suatu proyek dengan perencanaan strategis yang disepakati. Secara konseptual, evaluasi adalah melihat apa yang dilakukan, apa yang telah dicapai, dan bagaimana cara mencapainya. Evaluasi juga bisa bersifat sumatif, yaitu mengambil pembelajaran dari sebuah proyek yang telah selesai atau dari sebuah organisasi yang sudah tidak berfungsi lagi. Evaluasi bisa bersifat formatif, yaitu dilakukan ditengah berlangsungnya suatu proyek atau organisasi, agar selalu terjadi perbaikan.

Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renja sampai dengan

Triwulan I tahun 2025 dimaksudkan untuk mengetahui ketercapaian program kegiatan masing-masing perangkat daerah hingga Triwulan I Tahun 2025. Dalam pelaksanaannya terdapat faktor pendorong dan penghambat keberhasilan suatu kinerja bisa tercapai. Adapun Evaluasi kinerja pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tangerang.

Berikut ini akan diuraikan mengenai kajian (review) tehadap hasil evaluasi pelaksanaan kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tangerang Triwulan I Tahun Anggaran 2025 serta progres pencapaian kinerja dalam Renstra periode 2024-2026 sehingga dapat teridentifikasi sampai sejauh mana Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tangerang telah melaksanakan program dan kegiatannya.

Tabel 2.1.2
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten Tangerang
Renja Perangkat Daerah Dinas Koperaasi dan Usaha mikro Kabupaten Tangerang
Periode Pelaksanaan : Triwulan II Tahun 2025

Kode	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024-2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (%)		unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10=6+9		11 = 10/5*100%		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Nilai Akip	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan	300%	6.068.292.484	92,73%	2.289.084.570	100%	2.870.952.932	25%	1.158.638.610	25 %	1.158.638.610	117,73 %	3.447.723.180	39,24%	56,82%	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
			Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	300%	29.314.003.673	100,00 %	8.253.046.465	100%	9.526.955.529	25%	2.291.353.453	25 %	2.291.353.453	125,00 %	10.544.399.918	41,67%	35,97%	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24	313.595.507	8	400.908.200	8	429.290.799	2	15.500.000	2	15.500.000	10	416.408.200	41,67%	132,79 %	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
		Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12	188.575.036	4	270.301.600	4	223.552.149	1	7.500.000	1	7.500.000	5	277.801.600	41,67%	147,32 %	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6	39.095.602	2	110.806.600	2	186.417.150	1	8.000.000	1	8.000.000	3	118.806.600	50,00%	303,89 %	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
		Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6	85.924.869	2	19.800.000	2	19.321.500	-	0	0	-	2	19.800.000	33,33%	23,04%	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya laporan keuangan	3	29.000.408.166	1	7.852.138.265	1	9.097.664.730	1	2.275.853.453	1	2.275.853.453	2	10.127.991.718	66,67%	34,92%	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
		Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	42	28.978.742.031	14	7.850.705.265	14	9.073.451.475	4	2.271.353.453	4	2.271.353.453	18	10.122.058.718	42,86%	34,93%	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3	21.666.135	1	1.433.000	1	24.213.255	-	4.500.000	0	4.500.000	1	5.933.000	33,33%	27,38%	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
		Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya laporan Barang Milik Daerah	3	26.761.350	1	4.000.000	1	9.665.000	-	2.000.000	0	2.000.000	1	6.000.000	33,33%	22,42%	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3	26.761.350	1	4.000.000	1	9.665.000	-	2.000.000	0	2.000.000	1	6.000.000	33,33%	22,42%	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang difasilitas	120	753.919.339	40	106.570.000	40	127.562.700	-	0	0	-	40	106.570.000	33,33%	14,14%	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
		Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	120	523.502.295	40	106.570.000	40	127.562.700	-	0	0	-	40	106.570.000	33,33%	20,36%	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	90	3.655.825.851	30	1.878.186.882	30	1.891.584.500	12	749.024.400	12	749.024.400	42	2.627.211.282	46,67%	71,86%	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
		Sub Kegiatan Penyediaan Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	21	12.483.221	7	38.581.000	7	89.983.500	3	18.583.500	3	18.583.500	10	57.164.500	47,62%	457,93 %	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	48	507.752.643	16	839.614.000	16	966.800.400	10	651.728.000	10	651.728.000	26	1.491.342.000	54,17%	293,71 %	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	60	53.624.923	20	16.425.000	20	15.394.000	20	15.359.000	20	15.359.000	40	31.784.000	66,67%	59,27%	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	90	195.535.440	30	99.639.000	30	108.757.600	10	35.545.900	10	35.545.900	40	135.184.900	44,44%	69,14%	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	30	36.331.335	10	14.755.000	10	10.635.000	10	10.583.000	10	10.583.000	20	25.338.000	66,67%	69,74%	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15	88.549.120	5	18.500.000	5	120.000.000	1	10.500.000	1	10.500.000	6	29.000.000	40,00%	32,75%	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
		Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	3	276.548.514	1	113.901.000	1	80.850.000	-	6.205.000	0	6.205.000	1	120.106.000	33,33%	43,43%	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6	1.988.500.655	2	736.771.882	2	499.164.000	-	520.000	0	520.000	2	737.291.882	33,33%	37,08%	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang	12	70.046.220	4	17.000.000	2	17.108.784	1	3.750.000	1	3.750.000	5	20.750.000	41,67%	29,62%	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6	50.186.220	2	17.000.000	2	17.108.784	1	3.750.000	1	3.750.000	3	20.750.000	50,00%	41,35%	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
		Kegiatan :Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	87	1.561.739.724	29	283.327.688	29	825.031.948	10	403.864.210	10	403.864.210	39	687.191.898	44,83%	44,00%	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	33	633.668.353	11	180.223.693	5	182.101.964	2	7.766.878	2	7.766.878	13	187.990.571	39,39%	29,67%	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	33	380.670.191	10	78.072.995	3	80.979.984	1	4.041.332	1	4.041.332	11	82.114.327	33,33%	21,57%	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
		Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21	50.901.180	7	25.031.000	30	48.900.000	-	0	0	-	7	25.031.000	33,33%	49,18%	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
		Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3	496.500.000			1	513.050.000	1	392.056.000	1	392.056.000	1	392.056.000	33,33%	78,96%	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
	Prosentase Koperasi yang meningkat Omzet dan Asetnya	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase update dan jumlah Koperasi aktif yang dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	64,29%	2.482.500.000	17,86%	252.600.900	21,43 %	130.555.500	7,5%	48.170.800	8%	48.170.800	25,36%	300.771.700	39,44%	12,12%	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
		Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi aktif yang dilakukan pemeriksaan dan pengawasan.	900	2.482.500.000	100	252.600.900	100	130.555.500	25	48.170.800	25	48.170.800	125	300.771.700	13,89%	12,12%	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
		Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	450	1.241.250.000	50	141.495.800	50	60.530.750	25	42.987.800	25	42.987.800	75	184.483.600	16,67%	14,86%	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
		Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	450	1.241.250.000	50	111.105.100	50	70.024.750	25	5.183.000	25	5.183.000	75	116.288.100	16,67%	9,37%	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase update dan jumlah Koperasi aktif yang dilakukan penilaian dan pemeringkatan.	81,09	2.482.500.000	7,14%	111.234.100	27,03 %	1.256.702.250	-	0	0%	-	7,14%	111.234.100	0,09%	4,48%	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

		Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi Aktif yang dilakukan Penilaian dan Pemeringkatan Kesehatan.	480	2.482.500.000	40	111.234.100	160	1.256.702.250	-	0	0	-	40	111.234.100	8,33%	4,48%	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Panilaian KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penilaian dan Pemeringkatan Kinerjanya dan Kesehatan KSP/USP. (Progul)	480	2.482.500.000	40	111.234.100	50	1.256.702.250	-	0	0	-	40	111.234.100	8,33%	4,48%	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Jumlah Koperasi berkualitas	53,58 %	1.655.000.000	5,36%	149.388.300	17,86 %	1.025.993.667	-	0	0%	-	5,36%	149.388.300	10,00%	9,03%	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM Koperasi yang mengikuti pendidikan dan latihan perkoperasian	300	1.655.000.000	130	149.388.300	100	1.025.993.667	-	0	0	-	130	149.388.300	43,33%	9,03%	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	300	1.655.000.000	130	149.388.300	100	1.025.993.667	-	0	0	-	130	149.388.300	43,33%	9,03%	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase update dan jumlah Koperasi aktif yang dilakukan Peningkatan Pemberdayaan dan perlindungan Koperasi.	80,37%	4.965.000.000	35,18%	857.928.600	26,79 %	1.025.993.667	5,36 %	334.948.070	5%	334.948.070	40,54%	1.192.876.670	50,44%	24,03%	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
		Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi Aktif yang dilakukan Peningkatan pemberdayaan dan perlindungan koperasi.	300	4.965.000.000	197	857.928.600	100	1.025.993.667	37	334.948.070	37	334.948.070	234	1.192.876.670	78,00%	24,03%	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
		Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, AksesPasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha Produktif Koperasi yang Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	300	4.965.000.000	252	857.928.600	100	1.025.993.667	37	334.948.070	37	334.948.070	289	1.192.876.670	96,33%	24,03%	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
	Prosentase Usaha Mikro yang meningkat	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Prosentase Usaha Mikro yang diberdayakan	9,4%	4.200.000.000	9,84%	2.009.472.100	2,80%	6.739.147.682	0,58 %	435.996.500	1%	435.996.500	10,42%	2.445.468.600	110,85%	58,23%	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

	Kualitasnya	Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Usaha Mikro yang terfasilitasi legalitas usaha dan mendapat penguatan kewirausahaan	3.265	4.200.000.000	2.550	2.009.472.100	2.040	6.739.147.682	512	435.996.500	512	435.996.500	3.062	2.445.468.600	93,78%	58,23%	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
		Sub Kegiatan Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Terfasilitasinya Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	1290	2.700.000.000	1750	1.387.275.100	1.630	3.389.786.700	335	115.878.000	335	115.878.000	2.085	1.503.153.100	161,63%	55,67%	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	975	1.050.000.000	800	622.197.000	410	3.349.360.982	178	320.118.500	178	320.118.500	978	942.315.500	100,31%	89,74%	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Koperasi dan Usaha Mikro yang terfasilitasi Dana Pemerintah melalui UPDB	6,42% 17,85 %	15.476.566.968	1,42% 28,34%	5.358.804.508	2,14% 5,95%	4.919.814.648	0,35 % 2,20 %	657.028.106	0% 2%	657.028.106	1,77% 30,54%	6.015.832.614	27,57% 171,09%	38,87%	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
			Prosentase Usaha Mikro yang Dipromosikan	4,80%	3.450.000.000	2,80%	2.527.502.200	1,60%	4.102.144.080	0,44 %	365.946.000	0%	365.946.000	3,24%	2.893.448.200	67,50%	83,87%	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
		Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Kecil	Jumlah Koperasi dan usaha mikro yang terfasilitasi Dana Pemerintah melalui UPDB	36 4500	15.476.566.968	8 7141	5.358.804.508	12 5.000	4.919.814.648	2 584	657.028.106	2 584	657.028.106	10 7.725	6.015.832.614	27,78% 171,67%	38,87%	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
			Pesentase produk Usaha Mikro yang difasilitasi Promosi	100%	3.450.000.000	100%	2.527.502.200	350	4.102.144.080	110	365.946.000	110	365.946.000	111	2.893.448.200	11100,00 %	83,87%	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
		Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	36 4500	15.476.566.968	8 7141	5.358.804.508	12 5.000	4.919.814.648	2 584	657.028.106	2 584	657.028.106	10 7.725	6.015.832.614	27,78% 171,67%	38,87%	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
		Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	1200	3.450.000.000	700	2.527.502.200	350	4.102.144.080	110	365.946.000	110	365.946.000	810	2.893.448.200	67,50%	83,87%	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Total					70.093.863.124		21.809.061.743		31.598.259.955		5.292.081.539		5.292.081.539		27.101.143.282			

Di Tahun 2025, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tangerang melaksanakan 7 Program dan 13 Kegiatan dan 29 Sub Kegiatan dengan Anggaran Rp 30.712.313.288,00. Adapun penyerapan angaran sebesar Rp 5.290.081.539,00 atau 17,22% dan Realisasi Fisik sebesar 19,67%. Secara umum kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tangerang selama Triwulan 1 TA. 2025 sudah cukup baik.

Penyerapan anggaran di Triwulan I yaitu 17,22%, ini lebih rendah dari yang sudah di rencanakan yaitu 25,04% dengan realisasi Fisik sebesar 19,67%. Adapun faktor yang mengurangi penyerapan anggaran yaitu:

1. Program Pengembangan UMKM, seluruh kegiatan berjalan dengan baik tetapi terdpat penyerapan anggaran yang terlambat dan harus di cairkan di triwulan II, hal tersebut dikarenakan terdapat kesulitan pihak ke 3 yang sudah PKP (Coretax) dan adanya refocusing anggaran, menyebabkan terkendalanya pelaksanaan kegiatan dan pencairan anggaran.
2. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm), seluruh kegiatan berjalan dengan baik tetapi terdapat penyerapan anggaran yang terlambat dan harus di cairkan di triwulan II, hal tersebut dikarenakan terdapat kesulitan pihak ke 3 yang sudah PKP (Coretax) dan adanya refocusing anggaran, menyebabkan terkendalanya pelaksanaan kegiatan dan pencairan anggaran.
3. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi, seluruh kegiatan berjalan dengan baik tetapi terdapat penyerapan anggaran yang terlambat dan harus di cairkan di triwulan II, hal tersebut dikarenakan terdapat kesulitan pihak ke 3 yang sudah PKP (Coretax) dan adanya refocusing anggaran, menyebabkan terkendalanya pelaksanaan kegiatan dan pencairan anggaran.
4. Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi, pada Triwulan I belum dilaksanakan karena jadwal kegiatan dilaksanakan di triwulan II.
5. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian, pada Triwulan I belum dilaksanakan karena jadwal kegiatan dilaksanakan di triwulan II.
6. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi, seluruh kegiatan berjalan dengan baik tetapi terdapat penyerapan anggaran yang terlambat dan harus di cairkan di triwulan II, hal tersebut dikarenakan terdapat kesulitan pihak ke 3 yang sudah PKP (Coretax) dan adanya refocusing anggaran, menyebabkan terkendalanya pelaksanaan kegiatan dan pencairan anggaran.
7. Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, seluruh kegiatan berjalan dengan baik tetapi terdapat penyerapan anggaran yang terlambat dan harus di cairkan di triwulan II, hal tersebut dikarenakan terdapat kesulitan pihak ke 3 yang sudah PKP (Coretax) dan adanya refocusing anggaran, menyebabkan terkendalanya pelaksanaan kegiatan dan pencairan anggaran.

Pada pelaksanaan program dan kegiatan di Triwulan I, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tangerang menghadapi beberapa kendala signifikan. Salah satu hambatan utama adalah kesulitan dalam mencari penyedia barang/jasa (pihak ketiga) yang telah berstatus Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan terdaftar dalam sistem Coretax. Selain itu, adanya refocusing anggaran turut menyebabkan terhambatnya pelaksanaan kegiatan dan keterlambatan pencairan anggaran.

Permasalahan tersebut menjadi bahan evaluasi penting bagi pelaksanaan program/kegiatan di triwulan berikutnya. Oleh karena itu, diperlukan beberapa langkah perbaikan yang dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kelancaran pelaksanaan kegiatan. Langkah-Langkah Perbaikan yang Perlu Dilakukan:

1. Pemetaan dan Inventarisasi Penyedia (Vendor) PKP
    a. Melakukan pemetaan lebih awal terhadap daftar penyedia barang/jasa yang sudah PKP di lingkungan regional atau lokal.
    b. Bekerja sama dengan ULP dan bagian pengadaan barang/jasa untuk mengakses database penyedia yang terverifikasi Coretax.
    c. Menyusun daftar vendor cadangan untuk mengantisipasi kegagalan lelang atau pembatalan pengadaan.
2. Perencanaan Ulang Jadwal Kegiatan (Re-Scheduling)
    a. Menyesuaikan kembali jadwal kegiatan pada DPA berdasarkan realisasi dan hambatan triwulan sebelumnya.
    b. Menyusun timeline kegiatan yang realistis dan dapat diimplementasikan dalam sisa waktu anggaran.
3. Koordinasi Intensif dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)
    a. Melakukan konsultasi berkala dengan TAPD terkait dampak refocusing terhadap kegiatan dinas.
    b. Mengajukan revisi kegiatan jika ada perubahan alokasi anggaran secara signifikan, agar program tetap berjalan dengan sasaran yang sesuai.
4. Peningkatan Kapasitas Tim Teknis
    a. Memberikan pelatihan teknis terkait tata cara pengadaan, termasuk mekanisme pemilihan penyedia yang sesuai Coretax dan regulasi perpajakan.
    b. Mengoptimalkan peran Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan PPTK dalam percepatan proses administrasi.
5. Monitoring dan Evaluasi Internal Lebih Ketat
    a. Menetapkan mekanisme monitoring mingguan dan bulanan untuk mengevaluasi progres kegiatan.
    b. Mengidentifikasi lebih awal potensi keterlambatan dan menetapkan langkah korektif yang cepat dan terukur.
6. Optimalisasi Komunikasi Antar Bidang dan Sub-Kegiatan
    a. Mendorong koordinasi rutin lintas bidang/sub kegiatan dalam lingkungan dinas untuk menyamakan persepsi pelaksanaan program.
    b. Membentuk tim percepatan pelaksanaan kegiatan prioritas.
7. Antisipasi Risiko Refocusing dan Penyesuaian Rencana

Kegiatan

a. Menyusun skenario alternatif program berdasarkan potensi perubahan kebijakan anggaran atau dinamika fiskal.
b. Menjaga fleksibilitas dalam perencanaan kegiatan non-fisik atau kegiatan dukungan yang mudah disesuaikan.

Dengan pelaksanaan langkah-langkah perbaikan tersebut, diharapkan kinerja program dan kegiatan pada Triwulan II dan seterusnya dapat berjalan lebih optimal, efektif, dan akuntabel, serta tetap mendukung capaian target kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tangerang Tahun 2025 secara keseluruhan.

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan SKPD

Penyelenggaraan pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tangerang adalah melaksanakan fungsi dan tugas membantu Bupati Kabupaten Tangerang dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Koperasi dan Usaha Mikro yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah di Kabupaaten Tangerang, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 26 tahun tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tangerang.

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tangerang mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tangerang tahun 2024-2026. Analisis ini salah satunya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tangerang. Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tangerang pada tahun 2023 masih mengacu pada Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 dan tahun 2024 mengacu pada renstra tahun 2024-2026. Pencapaian Kinerja pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tangerang adalah sebagai berikut.

Tabel 2.2.2
Pencapaian Kinerja pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tangerang Tahun 2022-2024

No	Indikator	IKK	Target renstra perangkat daerah				Realisasi Capaian			Proyeksi	Catatan analisa
			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Prosentase Usaha Mikro yang mengalami Peningkatan omset dan aset	-	10%	10,50 %	-	-	10,48%	12,36%	-	-	
2	Prosentase Koperasi yang mengalami Peningkatan omset dan aset	-	50%	55%	-	-	31,21%	61,06%	-	-	

3	Prosentase Usaha Mikro yang meningkat Kualitasnya	-	-	-	10,0%	10,5%	-	-	11,30%	10,5%	
4	Prosentase Koperasi yang meningkat Omzet dan Asetnya	-	-	-	56,79 %	65,71%	-	-	56,79%	65,71%	
5	Nilai AKIP	-	71,9	72,41	76,41	76,91	81,5	77,2	64,	76,91	
6	-	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	-	-	56,96 %	71,25%	28,40%	42,67%	52,32	71,25%	

Adapun Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tangerang Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Indikator “Prosentase Usaha Mikro yang meningkat Kualitasnya” pada tahun 2024 dapat melampaui target, dimana dari target sebesar 10,50% dapat terealisasi sebesar 11,30% (capaian sebesar 107,62%);
2. Indikator “Prosentase Koperasi yang meningkat Omzet dan Asetnya” sesuai target, dimana dari target sebesar 56,79% teralisasi sebesar 56,79%% (capaian sebesar 100%).Indikator “Nilai AKIP” tidak mencapai target, dimana dari target sebesar 76,41% teralisasi sebesar 64,65% (capaian sebesar 84,59%). Adapun penyebabnya yaitu :
   a. Kualitas Perencanaan Kinerja yang Belum Optimal, Masih ditemukan ketidaktepatan antara indikator kinerja, sasaran strategis, dan program kegiatan serta Indikator belum seluruhnya mencerminkan *outcome* (hasil), masih banyak yang berfokus pada *output*.
   b. Pengukuran dan Pelaporan Kinerja Kurang Akurat, yaitu Sistem pengukuran kinerja belum sepenuhnya berbasis hasil (result-oriented) serta Laporan kinerja belum sepenuhnya memuat analisis capaian dan evaluasi penyebab ketidaktercapaian indikator secara mendalam.
   c. Manajemen Kinerja Belum Terintegrasi, yaitu Belum optimalnya keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja (belum fully integrated performance management) serta SKP pegawai belum terintegrasi secara menyeluruh dengan indikator kinerja dinas.
   d. Kapasitas SDM dalam Pengelolaan AKIP Terbatas, yaitu Masih terdapat kekurangan pemahaman teknis dalam menyusun dokumen SAKIP, seperti Renstra, Renja, LKjIP, dan IKU.
3. Indikator kinerja kunci (IKK) yaitu Meningkatnya Koperasi yang berkualitas tidak mencapai target, dimana dari target sebesar 56,96% teralisasi sebesar 52,32% (capaian sebesar 91,85%). Meskipun capaian indikator mendekati target (91,85%), realisasi tersebut masih berada di bawah target yang ditetapkan. Beberapa faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target antara lain:
   a. Kapasitas Manajerial dan Tata Kelola Koperasi Masih

Lemah, yaitu Banyak koperasi yang belum memenuhi kriteria koperasi berkualitas, seperti memiliki RAT (Rapat Anggota Tahunan) tepat waktu, laporan keuangan yang akuntabel, dan legalitas lengkap. Selainitu juga rendahnya pemahaman pengurus koperasi terhadap prinsip-prinsip tata kelola koperasi modern dan praktik bisnis yang sehat.

b. Terbatasnya Akses dan Jangkauan Pembinaan, sehingga Kegiatan pendampingan koperasi belum merata ke seluruh wilayah kecamatan, terutama di wilayah pelosok atau desa. Serta rasio jumlah koperasi dengan tenaga penyuluh/pembina belum sebanding, sehingga tidak semua koperasi mendapat intervensi pembinaan secara berkala.
c. Rendahnya Partisipasi Anggota dan Kinerja Usaha Koperasi, yaitu Banyak koperasi pasif atau kurang aktif menjalankan usaha secara produktif. Serta kurangnya inovasi usaha dan adaptasi teknologi menyebabkan koperasi sulit berkembang menjadi entitas usaha yang sehat.
d. Terbatasnya kegiatan penguatan kelembagaan koperasi akibat keterbatasan pembiayaan.

Untuk mengatasi kendala tersebut dan meningkatkan pencapaian indikator di periode berikutnya, beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan antara lain:

1. Perbaikan Perencanaan Kinerja dengan menyusun ulang indikator kinerja agar lebih relevan dan mengarah pada capaian outcome (hasil nyata) serta melakukan review Renstra dan Renja agar selaras dengan indikator prioritas nasional dan RPJMD/RPD.
2. Peningkatan Kualitas Pengukuran dan Evaluasi Kinerja dengan elakukan bimbingan teknis penyusunan laporan kinerja (LKjIP) yang berbasis hasil dan analitis dan juga mengembangkan sistem pelaporan yang lebih terstruktur dan real-time menggunakan aplikasi kinerja atau dashboard sederhana.
3. Integrasi Manajemen Kinerja, yaitu mengintegrasikan perencanaan kinerja dengan penganggaran melalui SIPD dan e-SAKIP. Serta menyesuaikan indikator SKP pegawai dengan indikator kinerja unit kerja secara konsisten.
4. Peningkatan Kapasitas SDM dengan menyelenggarakan pelatihan penyusunan dokumen SAKIP.
5. Koordinasi dan Penguatan Sistem Pengawasan Internal dengan memperkuat peran pengendalian internal (APIP) dalam mereview dokumen kinerja serta melakukan evaluasi triwulan terhadap kemajuan pencapaian indikator AKIP dan tindak lanjutnya.
6. Peningkatan Kapasitas Koperasi dengan menyelenggarakan pelatihan manajemen koperasi, penyusunan laporan keuangan, RAT, dan literasi hukum bagi pengurus koperasi. Serta mendorong koperasi untuk melakukan digitalisasi sistem keuangan dan transparansi laporan kinerja usaha.

7. Optimalisasi Pembinaan dan Pendampingan dengan Meningkatkan intensitas monitoring dan evaluasi koperasi secara berkala melalui penempatan tenaga pendamping koperasi wilayah dan menyusun mekanisme klasifikasi koperasi berdasarkan kinerja (sehat, cukup sehat, tidak sehat) sebagai dasar pembinaan yang lebih terarah.
8. Meningkatkan Kolaborasi dengan Stakeholder, yaitu Bekerja sama dengan perguruan tinggi, BUMN, BUMDes, dan swasta untuk program penguatan kapasitas kelembagaan koperasi serta menjalin kemitraan antara koperasi dan lembaga keuangan untuk mendukung akses permodalan.
9. Penguatan Sistem Penilaian Koperasi Berkualitas dengan menyempurnakan indikator penilaian koperasi berkualitas agar lebih objektif dan mudah diukur (misalnya berbasis RAT, Sisa Hasil Usaha, rasio pertumbuhan aset). Selain itu perlu mengembangkan sistem pelaporan mandiri berbasis aplikasi yang memudahkan koperasi melaporkan kinerja secara berkala.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tangerang memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui penguatan koperasi dan pemberdayaan usaha mikro. Namun, dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, dinas menghadapi berbagai isu strategis yang memerlukan perhatian serius. Isu-isu ini berdampak langsung terhadap capaian kinerja serta kualitas pelayanan publik yang diberikan. Berikut adalah isu-isu yang dihadapi, dampak serta Langkah-langkah yang akan dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro pada tahun 2025:

1. **Rendahnya Literasi Usaha dan Digitalisasi di Kalangan Pelaku Usaha Mikro**

Sebagian besar pelaku usaha mikro masih memiliki keterbatasan dalam manajemen usaha, pencatatan keuangan, dan pemanfaatan teknologi digital. Mayoritas belum memahami pemasaran online, pembukuan sederhana, atau aplikasi digital seperti e-commerce dan e-payment. Sehingga isu-isu yang terjadi di kalangan pengusaha mikro akan memberikan dampak antara lain:

1. Pelaku usaha sulit berkembang dan tidak mampu bersaing.
2. Tidak memenuhi syarat untuk mengakses pembiayaan formal.
3. Terbatasnya jangkauan pasar dan stagnasi pendapatan.

Untuk menjawab isu tersebut maka disusunlah beberapa kebijakan perencanaan kegiatan di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tangerang

adalah sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan pelatihan literasi digital dan keuangan secara masif dan berkelanjutan.
2. Menyediakan klinik usaha mikro di kecamatan.
3. Mengembangkan modul pelatihan praktis berbasis sektor usaha.

2. Tingginya Jumlah Koperasi Tidak Aktif dan Lemahnya Tata Kelola

Masih banyak koperasi yang tidak aktif, tidak melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT), serta tidak menerapkan prinsip tata kelola koperasi yang baik (transparan, partisipatif, akuntabel). Hal tersebut memberikan dampak antara lain

1. Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap koperasi.
2. Pemborosan anggaran pada koperasi yang tidak produktif.
3. Tidak tercapainya target rasio koperasi sehat.

Untuk menjawab isu tersebut maka disusunlah beberapa kebijakan perencanaan kegiatan di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tangerang adalah sebagai berikut :

1. Melakukan verifikasi dan pemutakhiran data koperasi aktif/nonaktif secara berkala.
2. Menghapus koperasi tidak aktif sesuai ketentuan.
3. Meningkatkan pelatihan pengurus koperasi tentang tata kelola yang baik (*Good Cooperative Governance*).

3. Belum Optimalnya Penyaluran dan Pengelolaan Dana Bergulir

Meskipun dana bergulir telah disalurkan, realisasi pengembalian belum optimal. Beberapa pelaku usaha mengalami kesulitan mengembalikan dana karena lemahnya pendampingan usaha atau kegagalan usaha. Sehingga meiliki dampak antara lain:

1. Menurunnya daya dukung dana bergulir untuk siklus pembiayaan berikutnya.
2. Meningkatnya rasio non-performing loan (NPL).
3. Ketidaktepatan sasaran penerima bantuan.

Untuk menjawab isu tersebut maka disusunlah beberapa kebijakan perencanaan kegiatan di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tangerang adalah sebagai berikut :

1. Menerapkan asesmen kelayakan usaha secara ketat sebelum pencairan dana.
2. Melibatkan pendamping usaha untuk monitoring pasca pencairan.
3. Menyediakan sistem pelaporan pemanfaatan dana secara transparan.

4. Terbatasnya Akses Pasar dan Promosi Produk UMKM

Pelaku UMKM di Kabupaten Tangerang masih kesulitan memasarkan produknya secara luas, baik secara offline

maupun online, karena minimnya informasi, promosi, dan jejaring distribusi serta masih banyaknya pelaku Usaha mikro yang berpendidikan rendah serta ketidak mampuan dalam menafaatkan teknologi. Sehingga hal tersebut memberikan dampak antara lain:

1. Produk lokal sulit dikenal masyarakat luas.
2. Potensi peningkatan pendapatan pelaku usaha tidak maksimal.
3. Terbatasnya skala usaha yang dapat naik kelas.

Untuk menjawab isu tersebut maka disusunlah beberapa kebijakan perencanaan kegiatan di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tangerang adalah sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan event promosi secara rutin (expo, bazar, e-katalog lokal).
2. Membina UMKM agar siap masuk ke marketplace dan e-commerce.
3. Menjalin kemitraan promosi produk dengan hotel, pusat oleh-oleh, dan retail modern.

5. Layanan Publik Belum Sepenuhnya Terintegrasi Secara Digital

Beberapa layanan seperti pendaftaran koperasi, izin usaha mikro, permohonan pelatihan, dan pengajuan bantuan masih dilakukan secara manual atau setengah digital, dengan proses yang belum efisien. Digitalisasi layanan perlu dioptimalkan guna mempercepat pelayan publik yang lebih cepat, efektif dan efisien. Adapun dampak dari layanan public yang belum sepenuhnya terintegrasi secara digital antara lain:

1. Pelayanan lambat dan kurang responsif.
2. Sulitnya melakukan pelacakan data dan evaluasi program.
3. Rendahnya indeks kepuasan masyarakat (IKM).

Untuk menjawab isu tersebut maka disusunlah beberapa kebijakan perencanaan kegiatan di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tangerang adalah sebagai berikut :

1. Membangun sistem layanan digital terpadu (e-UMKM & Koperasi).
2. Melakukan pelatihan internal bagi petugas dalam penggunaan aplikasi.
3. Integrasi sistem data dengan OPD terkait (Disdukcapil, DPMPTSP, Bapenda).

6. Terbatasnya SDM Pendamping dan Fasilitator Lapangan

Jumlah tenaga pendamping UM dan pengawas koperasi masih belum mencukupi, sementara cakupan wilayah dan jumlah pelaku usaha yang harus didampingi sangat luas yaitu 61011 Usaha mikro dan 1887 Koperasi. Hal ini tidak sebanding dengan jumlah tenaga pendamping UM yang berjumlah 19 orang dan penyuluh koperasi yang berjumlah 7 orang. Rendahnya SDM pendamping dan penyuluh memberikan dampak antara lain:

1. Tidak meratanya pembinaan dan pengawasan.
2. Banyak UMKM dan koperasi tidak terpantau kinerjanya.
3. Lemahnya kualitas intervensi program.

Untuk menjawab isu tersebut maka disusunlah beberapa kebijakan perencanaan kegiatan di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tangerang adalah sebagai berikut :

1. Merekrut relawan pendamping atau bekerjasama dengan perguruan tinggi.
2. Meningkatkan kompetensi pendamping dengan pelatihan teknis dan sertifikasi.
3. Memberdayakan perangkat desa dan kecamatan sebagai mitra pembinaan.

7. Kurangnya Sinergi Program Lintas Sektor

Program pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro dan koperasi masih terfragmentasi antara OPD, dunia usaha, dan lembaga keuangan. Belum ada sinergi sistematis dalam hal pendampingan, pembiayaan, dan promosi. Sinergi lintas OPD, stake holder terkait perlu dilakukan dalam upaya memaksimalkan pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro serta Koperasi. Adapun dampak yang ditimbulakan antara lain:

1. Tumpang tindih program.
2. Duplikasi penerima manfaat.
3. Efektivitas anggaran rendah.

Untuk menjawab isu tersebut maka disusunlah beberapa kebijakan perencanaan kegiatan di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tangerang adalah sebagai berikut :

1. Membentuk forum koordinasi UMKM lintas OPD dan stakeholder.
2. Menyusun roadmap UMKM terpadu berbasis wilayah dan klaster.
3. Meningkatkan integrasi antara program pembinaan, pelatihan, dan pembiayaan.

Isu-isu di atas menjadi tantangan utama yang harus segera ditangani secara komprehensif dan terintegrasi. Kegagalan mengatasi isu-isu tersebut akan berdampak pada rendahnya kinerja, turunnya kepuasan masyarakat, dan melemahnya daya saing pelaku usaha lokal. Oleh karena itu, strategi perbaikan perlu difokuskan pada:

1. Penguatan sistem dan kelembagaan,
2. Peningkatan kapasitas sumber daya, serta
3. Kolaborasi aktif lintas sektor.

2.4 Reviu Terhadap Rancangan RKPD Kabupaten Tangerang

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tangerang Tahun 2025 merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam arah

kebijakan RPJPD Kabupaten Tangerang tahun 2024-2026 yang dijabarkan dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026. Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tangerang Tahun 2025 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017.

Dalam konteks perencanaan pembangunan, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tangerang dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan, melayani/memenuhi kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, dalam era globalisasi, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tangerang dituntut untuk siap dan sanggup membuat/menyusun suatu perencanaan yang baik, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Untuk lebih jelasnya mengenai review rancangan RKPD Perubahan Tahun 2025 dapat dilihat Tabel 2.4.1 berikut ini:

Tabel 2.4.1
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Kabupaten Tangerang

NO	Rencana Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	LOKASI	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	LOKASI	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan***	- Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100 Persen 100 Persen**	**13.043.240.451,00**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan***	- Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**100 Persen 100 Persen**	**12.675.755.225,00**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	- Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8 Dokumen	527.142.804,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	- Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8 Dokumen	452.533.484,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Tersedianya laporan keuangan*	- Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	9.099.627.815,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Tersedianya laporan keuangan*	- Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	9.149.573.709,00	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Tersedianya laporan Barang Milik Daerah*	- Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	10.220.000,00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Tersedianya laporan Barang Milik Daerah*	- Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	9.665.000,00	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah pegawai yang difasilitas*	- Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40 Orang	148.861.600,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah pegawai yang difasilitas*	- Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40 Orang	135.596.600,00	

	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah*	- Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30 jenis	2.415.247.500,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah*	- Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30 jenis	2.007.395.700,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Jasa Penunjang*	- Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 jenis	17.108.784,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Jasa Penunjang*	- Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 jenis	19.508.784,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	- Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29 jenis	825.031.948,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	- Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29 jenis	901.481.948,00	
2.	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	***Persentase update dan jumlah Koperasi aktif yang dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan***	- Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**21.43 Persen**	**168.574.000,00**	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	***Persentase update dan jumlah Koperasi aktif yang dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan***	- Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**21.43 Persen**	**130.555.500,00**	
	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	*Jumlah Koperasi aktif yang dilakukan pemeriksaan dan pengawasan.*	- Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300 Koperasi	168.574.000,00	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	*Jumlah Koperasi aktif yang dilakukan pemeriksaan dan pengawasan.*	- Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300 Koperasi	130.555.500,00	
3.	**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**	***Persentase update dan jumlah Koperasi aktif yang dilakukan penilaian dan pemeringkatan.***	- Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**27.03 Persen**	**150.426.000,00**	**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**	***Persentase update dan jumlah Koperasi aktif yang dilakukan penilaian dan pemeringkatan.***	- Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**27.03 Persen**	**140.047.000,00**	
	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Koperasi Aktif yang dilakukan Penilaian dan Pemeringkatan Kesehatan.*	- Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	160 Koperasi	150.426.000,00	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Koperasi Aktif yang dilakukan Penilaian dan Pemeringkatan Kesehatan.*	- Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	160 Koperasi	140.047.000,00	

4.	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	***Persentase Jumlah Koperasi berkualitas***	- Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**17.86 Persen**	**1.295.323.000,00**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	***Persentase Jumlah Koperasi berkualitas***	- Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**17.86 Persen**	**1.256.702.250,00**	
	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah SDM Koperasi yang mengikuti pendidikan dan latihan perkoperasian*	- Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Orang	1.295.323.000,00	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah SDM Koperasi yang mengikuti pendidikan dan latihan perkoperasian*	- Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Orang	1.256.702.250,00	
5.	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	***Persentase update dan jumlah Koperasi aktif yang dilakukan Peningkatan Pemberdayaan dan perlindungan Koperasi.***	- Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**26.79 Persen**	**1.157.423.090,00**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	***Persentase update dan jumlah Koperasi aktif yang dilakukan Peningkatan Pemberdayaan dan perlindungan Koperasi.***	- Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**26.79 Persen**	**2.909.382.867,00**	
	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Koperasi Aktif yang dilakukan Peningkatan pemberdayaan dan perlindungan koperasi.*	- Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Koperasi	1.157.423.090,00	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Koperasi Aktif yang dilakukan Peningkatan pemberdayaan dan perlindungan koperasi.*	- Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Koperasi	2.909.382.867,00	
6.	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	***Prosentase Usaha Mikro yang diberdayakan***	- Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.8 Persen**	**7.963.735.512,00**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	***Prosentase Usaha Mikro yang diberdayakan***	- Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.8 Persen**	**6.720.447.782,00**	
	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	*Usaha Mikro yang terfasilitasi legalitas usaha dan mendapat penguatan kewirausahaan*	- Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	655 Usaha Mikro	7.963.735.512,00	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	*Usaha Mikro yang terfasilitasi legalitas usaha dan mendapat penguatan kewirausahaan*	- Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	655 Usaha Mikro	6.720.447.782,00	
7.	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	***Persentase Koperasi dan Usaha Mikro yang terfasilitasi Dana Pemerintah melalui UPDB Prosentase Usaha Mikro yang Dipromosikan***	- Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1,40 Persen**	**4.221.746.730,00**	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	***Persentase Koperasi dan Usaha Mikro yang terfasilitasi Dana Pemerintah melalui UPDB Prosentase Usaha Mikro yang Dipromosikan***	- Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**1,40 Persen**	**4.341.050.080,00**	

	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	*Jumlah Koperasi dan usaha mikro yang terfasilitasi Dana Pemerintah melalui UPDB Pesentase produk Usaha Mikro yang difasilitasi Promosi*	- Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 persen	4.221.746.730,00	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	*Jumlah Koperasi dan usaha mikro yang terfasilitasi Dana Pemerintah melalui UPDB Pesentase produk Usaha Mikro yang difasilitasi Promosi*	- Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 persen	4.341.050.080,00	
	UPT PENGELOLA DANA BERGULIR - KUMKM				**4.981.324.648,00**	**UPT PENGELOLA DANA BERGULIR - KUMKM**				**5.107.147.296,00**	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		- Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		**4.981.324.648,00**	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**		- Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		**5.107.147.296,00**	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH		- Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		**4.981.324.648,00**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**		- Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		**5.107.147.296,00**	
1.	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	***Persentase Koperasi dan Usaha Mikro yang terfasilitasi Dana Pemerintah melalui UPDB Prosentase Usaha Mikro yang Dipromosikan***	- Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.14 Persen 5,95 Persen**	**4.981.324.648,00**	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	***Persentase Koperasi dan Usaha Mikro yang terfasilitasi Dana Pemerintah melalui UPDB Prosentase Usaha Mikro yang Dipromosikan***	- Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**2.14 Persen 5,95 Persen**	**5.107.147.296,00**	
	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	*Jumlah Koperasi dan usaha mikro yang terfasilitasi Dana Pemerintah melalui UPDB Pesentase produk Usaha Mikro yang difasilitasi Promosi*	- Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Koperasi 1500 Usaha Mikro	4.981.324.648,00	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	*Jumlah Koperasi dan usaha mikro yang terfasilitasi Dana Pemerintah melalui UPDB Pesentase produk Usaha Mikro yang difasilitasi Promosi*	- Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Koperasi 1500 Usaha Mikro	5.107.147.296,00	
					32.489.233.631,00					**33.281.088.000,00**	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Proses pengusulan kegiatan yang disampaikan masyarakat yang diawali dari Musrenbangdes, Musrenbang Kecamatan maupun melalui Jaring Aspirasi Masyarakat melalui Legislator sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada. Usulan kegiatan dari masyarakat sudah sesuai dengan isu-isu strategis dala rangka pembangunan Koperasi dan UM sehingga ada kesesuaian antara materi proses usulan dan proses dalam pembahasan perencanaan di tingkat Kabupaten melalui Forum SKPD dan Murenbang Kabupaten. Adapun usulan ditahun 2025 yang terangkum dalam Rancangan Awal Renja 2025 adalah sbb :

Tabel 2.5.1
Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Kabupaten Tangerang

No.	Program	Lokasi	Usulan	Permasalahan	Catatan
1.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Kecamatan Kemiri	Pelatihan Usaha Mikro	Bantuan Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro dan Koperasi	
2.	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Kecamatan Sepatan Timur	Pelatihan SDM Pelaku UMKM	Bantuan Pelatihan SDM Pelaku Usaha Mikro	
		Kecamatan Pagedangan	Pelatihan SDM	Pelatihan Keterampilan	
		Kecamatan Rajeg	Pelatihan SDM Pelaku UMKM	Bantuan Pembinaan Para Pelaku Umkm	Desa Sukaasih
			Pelatihan SDM Pelaku UMKM	Bantuan Pengembangan pola pendampingan kepada usaha kecil dan mikro	
		Kecamatan Cisoka	Pelatihan SDM Pelaku UMKM	Bantuan Pelatihan Keterampilan	
		Kecamatan Legok	Bantuan Pengambangan dan Peningkatan UMKM	Bantuan Alat Pengembangan Ekonomi Masyarakat (Gerobak UMKM, Mesin Produksi, Alat Jemur Produk, mesin potong, DLL)	
		Kecamatan Legok	Pelatihan SDM Pelaku UMKM	Bantuan Pelatihan SDM Pelaku UMKM Pembinaan dan Pelatihan bagi penyelenggara UMKM	
		Kecamatan Curug	Pelatihan SDM Pelaku UMKM	Bantuan Pelatihan SDM Pelaku UMKM	
		Kecamatan Rajeg	Pelatihan SDM Pelaku UMKM	Bantuan Pelatihan Keterampilan Pelatihan Tata Boga (1Paket)	Desa Sukamanah
		Kecamatan Cisauk	Pelatihan SDM Pelaku UMKM	Bantuan Pelatihan SDM Pelaku UMKM Sertifikasi BPOM, Izin Edar dan Halal bagi Pelaku UMKM	Kelurahan Cisauk
		Kecamatan Rajeg	Pelatihan SDM Pelaku UMKM	Pelatihan Keterampilan di Pembinaan dan Pengelolaan Makanan Tradisonal (1Paket)	Kelurahan Sukatani Kp. Larangan RT.03/07

		Kacamatan Cisauk	Pelatihan SDM Pelaku UMKM	Bantuan Sertifikasi BPOM, Izin Edar dan Halal	
		Kecamatan Pakuhaji	Pengambangan dan Peningkatan UMKM	Bantuan Sarana Prasarana UKM	
		Kecamatan Cisauk	Pelatihan SDM Pelaku UMKM	Bantuan Sertifikasi BPOM, Izin Edar dan Halal	Desa Cibogo
			Pelatihan SDM Pelaku UMKM	Bantuan Pelatihan Pembuatan Hak Paten dan sertifikat Halal bagi Pelaku UMKM	
		Kecamatan Mauk	Pelatihan SDM Pelaku UMKM	Bantuan Pelatihan Keterampilan di Kecamatan Mauk Pengembangan UMKM	Desa Ketapang
		Kecamatan Kosambi	Pelatihan SDM Pelaku UMKM	Bantuan Pelatihan SDM Pelaku UMKM Pelatihan Pemasaran UMKM	Kel. Kosambi Barat
			Pelatihan SDM Pelaku UMKM	Bantuan Pelatihan SDM Pelaku UMKM Pembinaan Pengembangan Kewirausahaa	
		Kecamatan Kosambi	Pelatihan SDM Pelaku UMKM	Bantuan Pelatihan SDM Pelaku UMKM Pelatihan umkm	desa salembaran jati
3.	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Kecamatan Pasar Kemis	Pengembangan Produk UMKM	Bantuan Pengembangan e-comerce Produk UMKM	
		Kecamatan Pasar Kemis	Pelatihan SDM Pelaku UMKM	Bantuan Pengembangan Usaha Para Pelaku Umkm Komamintang	Desa Gelamjaya
		Kecamatan Pasar Kemis	Pelatihan SDM Pelaku UMKM	Bantuan Pengembangan Usaha Perbengkelan (Las Listrik)	Desa Pasarkemis
		Kecamatan Pasar Kemis	Pelatihan SDM Pelaku UMKM	Bantuan Pengembangan Usaha Pembuatan Makanan (Kue)	Desa Pasarkemis
		Kecamatan Pasar Kemis	Pelatihan SDM Pelaku UMKM	Bantuan Pengembangan Usaha Kreativitas Kerajinan Tangan	Desa Pasarkemis
		Kecamatan Mauk	Pengambangan dan Peningkatan UMKM	Bantuan Pengembangan Desa Inovatif (Wisata, Sentra Produksi, Sentra Kuliner, Edukasi, dll)	
		Kecamatan Mauk	Pengambangan dan Peningkatan UMKM	Bantuan Pengembangan Rumah Kemasan Produk UMKM Mekar Sari Keripik Ubi	
		Kecamatan Cisauk	Pengambangan dan Peningkatan UMKM	Bantuan Pengembangan e-comerce Produk UMKM Pelatihan dan Peningkatan Pemasaran Produk UMKM	Kelurahan Cisauk
		Kecamatan Cisauk	Pengambangan dan Peningkatan UMKM	Pengembangan Pojok/Sentra UMKM Kecamatan/Desa Pujasera Parakan	
		Kecamatan Cisauk	Pengambangan dan Peningkatan UMKM	Bantuan Pengembangan e-comerce Produk UMKM	
		Kecamatan Kosambi	Pengambangan dan Peningkatan UMKM	Pengembangan Pojok/Sentra UMKM Kecamatan/Desa Gerai UMKM dan Kebun Sayur	RW. 003 Kel. Kosambi Barat

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pemberdayaan Koperasi dan UMKM, berkaitan langsung dengan kehidupan dan peningkatan kesejahteraan bagi sebagian besar rakyat Indonesia (pro poor). Selain itu, potensi dan peran strategisnya telah terbukti menjadi penopang kekuatan dan pertumbuhan ekonomi nasional (pro growth). Keberadaan Koperasi dan UMKM yang dominan sebagai pelaku ekonomi nasional juga merupakan subyek vital dalam pembangunan, khususnya dalam rangka pertuasan kesempatan berusaha bagi wirausaha baru dan penyerapan tenaga kerja serta menekan angka pengangguran (pro job).

Pendekatan pembangunan yang ditujukan pada pelaku ekonomi, khususnya pada Koperasi dan UMKM, amat penting. Langkah ini sekaligus untuk mempertegas penataan struktur pelaku ekonomi nasional. yang selama ini dalam kondisi dualistik dan timpang. Pembangunan yang ditujukan kepada Koperasi dan UMKM diharapkan menghantarkan penataan struktur pelaku ekonomi nasional lebih padu dan seimbang, baik datam skala usaha, strata dan sektoral, sehingga berkembang struktur pelaku ekonomi nasional yang kokoh dan mandiri.

Dengan memperhatikan peran dan potensinya dalam perekonomian nasional, keberadaan Koperasi dan UMKM terbukti merupakan pelaku usaha yang mandiri, kukuh dan fleksibel, dalam kondisi normal maupun krisis sekalipun. Bahkan tidak dapat disangkal oleh siapapun bahwa Koperasi dan UMKM merupakan leader perekonomian Indonesia. Ia menjadi jantung ekonomi rakyat, dan pelopor tumbuhnya ekonomi kerakyatan.

Beberapa kebijakan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat maupun Propinsi berkaitan dengan pengembangan Koperasi dan UMKM antara lain :

1. Peningkatan jumlah dan peran Koperasi dan UMKM dalam perekonomian Nasional melalui :
    a. Meningkatkan jumlah Koperasi yang sehat, kuat dan dipercaya.
    b. Meningkatkan peran dan kontribusi Koperasi dan UMKM dalam perekonomian Nasional.
2. Peningkatan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM melalui:
    a. Perubahan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 2025 Kabupaten Tangerang.
    b. Mengembangkan kebijakan dan program-program pemberdayaan Koperasi dan UM berdasarkan hasil kajian.
    c. Meningkatkan kualitas pengelolaan dan keterampilan SDM Koperasi dan UM.
3. Peningkatan Daya Saing Produk Koperasi dan UM melalui Meningkatkan kemampuan Koperasi dan UM dalam mengembangkan produk-produk kreatif, inovatif, berkualitas dan berdaya saing.
4. Peningkatan Pemasaran Produk Koperasi dan UM melalui Meningkatkan kelembagaan dan jaringan pemasaran serta pangsa pasar produk Koperasi dan UM.
5. Meningkatkan Akses Pembiayaan dan Penjaminan Koperasi dan UM melalui Penyediaan skema dan memperluas akses pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan Koperasi dan UM.
6. Pengembangan Wirausaha Koperasi dan UM baru melalui
    a. Menumbuhkan wirausaha baru yang inovatif.
    b. Meningkatkan kesadaran berwirausaha sebagai budaya dan mengembangkan kewirausahaan dikalangan

masyarakat

7. Perbaikan Iklim Usaha yang lebih Berpihak kepada Koperasi dan UM melalui:
   a. Meningkatkan kuantitas Layanan publik yang transparan, akuntabel dan kredibel.
   b. Menyediakan peraturan perundang-udangan yang Lebih berpihak pada Koperasi dan UM.

3.2 Tujuan dan Sasaran

3.2.1 Tujuan

Tujuan merupakan harapan dari pernyataan Misi yang akan dicapai atau dihasilkan, dalam jangka 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (Tiga) tahun, penetapan tujuan yang mengacu kedalam Rencana Strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu berkaitan dengan Koperasi dan Usaha Mikro di Kabupaten Tangerang. Adapun rumusan tujuan didalam Perencanaan Strategis pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tangerang.

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tangerang sebagai organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab pembangunan / pengembangan bidang Koperasi dan Usaha Mikro di wilayah Kabupaten Tangerang, berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026 pada misi tingkat Daerah Kabupaten Tangerang diarahkan memangku Misi ke 2 (dua) “Mewujudkan Perekonomian Daerah Yang Maju Dan Berdaya Saing Berbasis Pada Potensi Keunggulan Lokal”.

Adapun tujuan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro sebagai berikut :

1. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Sektor Unggulan.
2. Meningkatkan Kinerja Perangkat Daerah.

3.2.2 Sasaran

Sasaran adalah penjabaran tujuan yang dapat terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam 5 (lima) tahun.

Sesuai dengan rumusan tujuan yang telah diuraikan diatas sasaran yang akan dituangkan ke dalam Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam Tahun 2024-2026, maka sasaran dan Indikator sasaran adalah sebagai berikut :

- Sasaran
  1. Meningkatkan Kualitas Usaha Mikro
  2. Meningkatkan omzet dan aset Koperasi.
  3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.
- Indikator keberhasilan
  1. Prosentase Usaha Mikro yang meningkat Kualitasnya.
  2. Prosentase Koperasi yang meningkat Omzet dan Asetnya.
  3. Nilai AKIP.

1. Sasaran Meningkatkan Kualitas Usaha Mikro.

Untuk mencapai Sasaran “Meningkatkan Kualitas Usaha Mikro” pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tangerang, maka kebijakan yang ditetapkan adalah dengan melaksanakan :

1.1 Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM), dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan

melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan.

1.2 Program Pengembangan Umkm, dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Kecil.

2. Sasaran Meningkatkan omzet dan aset Koperasi.

Untuk mencapai sasaran "Meningkatkan omzet dan aset Koperasi" pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tangerang maka kebijakan yang ditetapkan adalah dengan melaksanakan :

2.1 Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi, dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota.

2.2 Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi, dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

2.3 Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian, dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota.

2.4 Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi, dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota.

3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.

Untuk mencapai Sasaran "Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah" pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tangerang, maka kebijakan yang ditetapkan adalah dengan melaksanakan Progam sebagai berikut ;

3.1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan sebagai berikut :

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
c. Penyediaan Alat Tulis Kantor.
d. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.
e. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
f. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.
g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tangerang dapat dilihat tabel 4.1.

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH DINAS KOPERSI DAN USAHA MIKRO PERIODE 2024-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal Kinerja		Target Capaian			Kondisi Akhir
						2022*	2023**	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Sektor Unggulan		Persentase Daya Saing Produk Usaha Mikro	jumlah Produk yang keluar daerah	%	20.45	20.45	22.73	26.52	30.30	100
		Meningkatkan Kualitas UM	Prosentase Usaha Mikro yang meningkat Kualitasnya	Jumlah UM yang sudah memiliki legalitas, fasiltasi kewirausahaan, Pemasaran dan Kemitraan dibagi jumlah UM yang sudah mendapatkan Perlakuan berjalan.	%	9.0	9.5	10.0	10.5	11.0	11.0
		Meningkatnya Omzet dan Aset Koperasi	Prosentase Koperasi yang meningkat Omzet dan Asetnya	Rata-rata dari Prosentase Koperasi Aktif, Koperasi yang Berkualitas dan Koperasi yang dilakukan Pengawasan dan Pemeriksaan	%	30	47.86	56.79	65.71	74.64	74.64
	Meningkatkan Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akip		%		75,91	76,41	76,91	77,41	77,41

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tangerang tidak lepas dari Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Pendukung (IKP) yang telah ditetapkan

Tabel 3.3.1
INDIKATOR KINERJA UTAMA

No.	Uraian	Alasan	Sumber data
1.	Prosentase Koperasi yang meningkat Omzet dan Asetnya	Meningkatnya pengelolaan manajemen koperasi merupakan indikasi terhadap peningkatan Omzet dan Aset	• Laporan yang membidangi urusan Koperasi • Laporan hasil Monev pembangunan pelaksanaan urusan Koperasi • Hasil Survey Tim Monitorinf
2.	Prosentase Usaha Mikro yang meningkat Kualitasnya	Meningkatnya Usaha Mikro yang memiliki legalitas, terfasiltasi kewirausahaan, Pemasaran dan Kemitraan merupakan indikasi terhadap peningkatan Kualitas Usaha Mikro.	• Hasil Laporan yang membidangi urusan Usaha Mikro • Laporan Hasil Monev pembangunan pelaksanaan urusan Usaha Mikro • Hasil survey Tim Monitong

Tabel 3.3.2
INDIKATOR KINERJA PENDUKUNG

No.	Uraian	Alasan	Sumber data
1.	Nilai AKIP.	Meningkatnya Capaian Kinerja yang merupakan Indikasi terhadap peningkatan Nilai AKIP	• Laporan yang membidangi urusan Sekretariat • Laporan hasil Monev pelaksanaan urusan Sekretariat

Berdasarkan Indikator Kinerja Utama dan Rencana Kinerja Tahunan dan untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran yang diharapkan, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2025 menyusun program dan kegiatan dengan 6 program wajib 6 Kegiatan sebagai pendukung IKU, sedangkan kegiatan dengan 1 Program 7 Kegiatan sebagai Indikator Kinerja Pendukung untuk meningkatkan kinerja perangkat daerah.

3.4 Perencanaan Kerja dan Pendanaan Perubahan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Dalam pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh OPD, diperlukan suatu perencanaan yang akan dijalankan di tahun mendatang. Perencanaan ini berisi program kegiatan menjadi tanggung jawab masing-masing OPD. Untuk OPD Dinas Koperaasi dan Usaha Mikro akan melaksanakan Program dan kegiatan sebagaimana pada tabel berikut ini :

Tabel 3.4.1
Perencanaan Kerja dan Pendanaan Perubahan Perangkat Daerah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2025 dan perkiraan Maju Tahun 2026

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan**	**100 persen 100 Persen**	**13.825.418.124,00**			**100Persen 100persen**	**13.419.469.955,00**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Dokumen	436.053.484,00			8Dokumen	549.937.201,00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	253.043.984,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4 Dokumen	295.576.611,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	2 Laporan	163.688.000,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Laporan	21.436.250,00

		Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	19.321.500,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Laporan	232.924.340,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya laporan keuangan	1 Dokumen	9.479.663.408,00			1Dokumen	10.027.093.000,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 Orang/bulan	9.453.393.408,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	14 Orang/bulan	10.000.000.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD							
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	26.270.000,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Laporan	27.093.000,00
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya laporan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	9.665.000,00			1Dokumen	10.021.000,00
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD							
		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	9.665.000,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Laporan	10.021.000,00

					Kel/Desa			
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang difasilitas	40 Orang	141.396.600,00			40Orang	189.784.760,00
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi							
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	36 Orang	141.396.600,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	10 Orang	189.784.760,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	30 jenis	2.766.908.900,00			30jenis	1.733.033.830,00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	122.692.900,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7 Paket	5.513.200,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	16 Paket	1.403.226.200,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	16 Paket	333.586.330,00
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20 Paket	21.896.400,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	25 Paket	16.567.100,00

	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	30 Paket	148.530.800,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	30 Paket	118.175.200,00
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	12.872.600,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	10 Paket	14.601.400,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan							
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	213.330.000,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5 Dokumen	15.936.800,00
	Fasilitasi Kunjungan Tamu							
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	98.014.000,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Laporan	133.430.000,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	746.346.000,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Laporan	1.095.223.800,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang	4 jenis	19.508.784,00			4jenis	16.678.200,00

	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	19.508.784,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Laporan	16.678.200,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	29 jenis	972.221.948,00			29jenis	892.921.964,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	182.101.964,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	11 Unit	219.463.169,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	80.979.984,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	11 Unit	346.384.452,00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	48.900.000,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7 Unit	35.860.000,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	660.240.000,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		291.214.343,00

					Kel/Desa			
2	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	**Persentase update dan jumlah Koperasi aktif yang dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan**	**21.43 Persen**	**130.451.700,00**			**21.43 Persen**	**395.744.240,00**
	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi aktif yang dilakukan pemeriksaan dan pengawasan.	300 Koperasi	130.451.700,00			300Koperasi	395.744.240,00
	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi							
		Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	25 Unit Usaha	60.516.800,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	50 Unit Usaha	247.048.560,00
	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota							
		Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	100 Unit Usaha	69.934.900,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	50 Unit Usaha	148.695.680,00
3	**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**	**Persentase update dan jumlah Koperasi aktif yang dilakukan penilaian dan pemeringkatan.**	**27.03 Persen**	**139.964.800,00**			**27.03 Persen**	**545.680.080,00**

	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi Aktif yang dilakukan Penilaian dan Pemeringkatan Kesehatan.	160 Koperasi	139.964.800,00			160Koperasi	545.680.080,00
	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota							
		Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	20 Unit Usaha	139.964.800,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	50 Unit Usaha	545.680.080,00
4	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	**Persentase Jumlah Koperasi berkualitas**	**17.86 Persen**	**242.836.920,00**			**17.86 Persen**	**650.897.720,00**
	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM Koperasi yang mengikuti pendidikan dan latihan perkoperasian	100 Orang	242.836.920,00			100Orang	650.897.720,00
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi							
		Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	160 Orang	242.836.920,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	100 Orang	650.897.720,00
5	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	**Persentase update dan jumlah Koperasi aktif yang dilakukan Peningkatan Pemberdayaan dan perlindungan Koperasi.**	**26.79 Persen**	**2.639.677.440,00**			**26.79 Persen**	**2.430.955.010,00**

	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi Aktif yang dilakukan Peningkatan pemberdayaan dan perlindungan koperasi.	374 Koperasi	2.639.677.440,00			100Koperasi	2.430.955.010,00
	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha							
		Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	150 Unit Usaha	2.639.677.440,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	50 Unit Usaha	2.430.955.010,00
6	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**Prosentase Usaha Mikro yang diberdayakan**	**3.1 Persen**	**5.149.823.390,00**			**3.1 Persen**	**4.503.714.831,00**
	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Usaha Mikro yang terfasilitasi legalitas usaha dan mendapat penguatan kewirausahaan	755 Usaha Mikro	5.149.823.390,00			855Usaha Mikro	4.503.714.831,00
	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro							
		Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	2070 Unit Usaha	1.886.170.600,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	480 Unit Usaha	1.881.811.140,00

	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan							
		Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	1160 Orang	3.263.652.790,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	375 Unit Usaha	2.621.903.691,00
7	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	**Prosentase Usaha Mikro yang Dipromosikan Persentase Koperasi dan Usaha Mikro yang terfasilitasi Dana Pemerintah melalui UPDB**	**1,60 Persen 2.14 Persen**	**10.260.489.376,00**			**2.14Persen 1,80Persen**	**11.810.661.794,00**
	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah Koperasi dan usaha mikro yang terfasilitasi Dana Pemerintah melalui UPDB Pesentase produk Usaha Mikro yang difasilitasi Promosi	1500 Usaha Mikro 100 persen	10.260.489.376,00			1500Usaha Mikro 100persen	11.810.661.794,00
	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi (Bid.Promosi)							
		Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	650 Unit Usaha	5.153.342.080,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	450 Unit Usaha	6.331.204.682,00
	Pengembangan Usaha Mikro							
		Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	1512 Unit Usaha	5 .107.147.296,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN DARI BLUD	1512 Unit Usaha	5.479.457.112,00
				33.281.088.000,00				**33.757.123.630,00**

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2025 ini merupakan Perubahan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tangerang 2024-2026 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Tangerang

Perubahan Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tangerang sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2025 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja tahun lalu.

5.1 Catatan Penting

Beberapa hal penting yang menjadi perhatian dalam pelaksanaan Renja Perubahan Tahun 2025 ini antara lain:

1. Perubahan pagu indikatif anggaran mempengaruhi prioritas dan cakupan kegiatan.
2. Penyesuaian target kinerja dilakukan dengan mempertimbangkan capaian sebelumnya dan kemampuan sumber daya.
3. Adanya dinamika eksternal (kebijakan nasional, inflasi, bencana alam, dsb.) yang berpengaruh terhadap kebutuhan refocusing program.
4. Perlunya peningkatan akurasi data pelaku Usaha Mikro dan koperasi sebagai dasar pengambilan keputusan yang tepat sasaran.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Agar pelaksanaan Renja Perubahan ini berjalan secara optimal, maka diperlukan pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan prinsip-prinsip berikut:

5. Efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan anggaran dan sumber daya;
6. Transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kegiatan;
7. Partisipasi aktif dari pemangku kepentingan dalam setiap tahap pelaksanaan;
8. Berorientasi hasil (result-based) dengan fokus pada pencapaian output dan outcome;
9. Sinergi lintas sektor untuk mencegah tumpang tindih dan memaksimalkan dampak program.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen ini, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tangerang akan melakukan Langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menyusun rencana operasional per kegiatan secara lebih rinci (RKA Perubahan) untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tepat waktu dan tepat sasaran.
2. Mengintegrasikan seluruh kegiatan ke dalam sistem penganggaran dan pengendalian (SIPD) sesuai ketentuan.
3. Melakukan koordinasi teknis dengan Bappeda, BPKAD, dan OPD terkait untuk penyesuaian target kinerja dan pendanaan.
4. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap capaian kinerja Renja Perubahan.
5. Menyampaikan laporan pelaksanaan dan realisasi secara transparan sesuai dengan siklus pengendalian pembangunan.

Dengan komitmen yang kuat dan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan, pelaksanaan Renja Perubahan ini diharapkan mampu memberikan

kontribusi signifikan dalam mendukung pemberdayaan koperasi dan usaha mikro yang inklusif, produktif, dan berdaya saing di Kabupaten Tangerang.

26. Dinas Pemuda, Olah Raga Kebudayaan dan Pariwisata

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dokumen perencanaan jangka panjang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, jangka menengah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah (RPJM) Daerah, perencanaan pembangunan tahunan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan perencanaan pembangunan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) tahunan dituangkan dalam Rencana Kerja (RENJA) Perubahan SKPD.

Rencana Kerja Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja – SKPD) merupakan kumpulan dari program dan kegiatan prioritas untuk periode satu tahun anggaran yang disusun mengacu kepada hasil Forum Tingkat Kecamatan, Forum SKPD dan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten serta melihat evaluasi pelaksanaan kegiatan dari tahun sebelumnya serta hasil capaian kinerja sampai dengan Triwulan ke I Tahun 2025, yang dikomparasi dengan tahapan Rencana Strategis (Renstra).

Sebagai dokumen perencanaan tahunan, Renja Perubahan – SKPD mempunyai peran yang sangat penting dalam mengarahkan seluruh kegiatan SKPD tahunan pada pencapaian visi yang telah ditetapkan. Ditinjau dari sisi transparansi dalam sistem akuntabilitas pemerintah, Renja Perubahan – SKPD merupakan acuan dasar dalam melaksanakan penilaian kinerja instansi pemerintah.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pada Bagian ketiga Rencana Pembangunan Tahunan pasal 21 ayat 3 dijelaskan bahwa, Kepala Satuan Perangkat Daerah menyiapkan Renja–SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal RKPD.

Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata (Disporabudpar) Kabupaten Tangerang sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2008, tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang ditetapkan sebagai salah satu Dinas di Kabupaten Tangerang. Operasionalisasi pelaksanaan dari tugas pokok dan wewenang Disporabudpar tersebut secara teknis diatur dalam Peraturan Bupati Tangerang Nomor 27 Tahun 2023 tentang rincian Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tangerang. Mengacu kepada Peraturan Bupati tersebut, Disporabudpar Kabupaten Tangerang mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan mengendalikan kegiatan di bidang pemuda, olahraga, kebudayaan dan pariwisata.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Disporabudpar mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pemuda, olahraga, kebudayaan dan pariwisata;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum bidang pemuda, olahraga, kebudayaan dan pariwisata;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pemuda, olahraga, kebudayaan dan pariwisata;
4. Perencanaan, pelaksanaaan, pengawasan dan pengendalian bidang pemuda, olahraga, kebudayaan dan pariwisata;

5. Perencanaan pola operasional dalam penanganan pembinaan kepemudaan, keolahragaan, kebudayaan dan pariwisata;
6. Pelaksanaan kegiatan dibidang kepemudaan yang meliputi pemberdayaan, pengembangan dan sarana prasarana kepemudaan ;
7. Pelaksanaan dan pengaturan kegiatan dibidang keolahragaan yang meliputi penyuluhan, pelatihan ,pertandingan dan sarana prasarana olahraga;
8. Pelaksanaan dan pengaturan kegiatan dibidang Kebudayaan dan Pariwisata meliputi Kesenian sejarah nilai tradisional ,Pengelolaan obyek wisata, Perijinan dan Pengembangan promosi usaha Wisata;
9. Pelaksanaan dan pengaturan kegiatan dibidang meliputi pengembangan kesenian daerah, pelestarian Cagar Budaya;
10. Pemassalan, pembibitan dan peningkatan prestasi olahraga;
11. Pemberian bantuan terhadap penyelenggaraan kegiatan olahraga yang bersifat nasional, regional dan internasional serta kegiatan olahraga di sekolah perguruan tinggi masyarakat dan instansi;
12. Penyelenggaraan kerjasama antar daerah dalam pembinaan tim olahraga;
13. Pelaksanaan penelitian bersama instansi terkait untuk pengembangan organisasi dan prestasi kepemudaan, olahraga pariwisata dan kebudayaan;
14. Penyediaan, pemeliharaan sarana dan prasarana kepemudaan, keolahragaan, pariwisata, budaya dan pengaturan penggunaannya;
15. Pemberian ijin atau rekomendasi atas penyelenggaraan kegiatan serta pembangunan sarana dan prasarana kepemudaan, olahraga, pariwisata dan kebudayaan;
16. Pemungutan retribusi dibidang keolahragaan dan pariwisata
17. Pemberian standarisasi produk dan harga satuan sarana olahraga;
18. Pemberian bantuan sarana dan prasarana olahraga kepada sekolah, perguruan tinggi organisasi olahraga dan masyarakat;
19. Pengawasan dan Pengendalian serta evaluasi seluruh kegiatan Bidang-bidang dan sekretariat sebagai bahan pengukuran kinerja Dinas.

1.2 Landasan Hukum

1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. UU No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
5. UU No. 10 Tahun 2009 Tentang Pariwisata
6. UU No. 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan
7. PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. PP No. 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. PP No. 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Olahraga;
10. PP No. 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga;
11. PP No. 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Olahraga;
12. Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Permendagri No. 59 tahun 2007 tentang Perubahan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang;
15. Keputusan Bupati Tangerang Nomor 27 Tahun 2023 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tangerang.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Perubahan untuk memberi arah sekaligus menjadi acuan bagi SKPD dalam mewujudkan visi dan Misi yang telah disepakati dalam rencana pembangunan tahunan. Selain itu Penyusunan Rencana Kerja ini, dimaksudkan untuk menyiapkan dokumen perencanaan tahunan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata, sebagai implementasi dari pentahapan rencana strategis SKPD yang memuat tentang kumpulan program dan kegiatan prioritas Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi untuk periode satu tahun anggaran.

Tujuan Penyusunan Renja Perubahan untuk mewujudkan hasil yang berkelanjutan sesuai program dan kegiatan, sehingga keberhasilannya mencapai target yang ditetapkan baik jangka pendek maupun jangka menengah antara lain adalah :

1. Sebagai bahan masukan untuk penyusunan Program Kerja dan Rencana Kerja Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2025;
2. Sebagai acuan Disporabudpar dalam melaksanakan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Disporabudpar tahun 2025;
3. Sebagai alat kontrol organisasi dalam mengendalikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan tahunan;
4. Sebagai tolok ukur keberhasilan SKPD dalam mengemban visi dan misi pemerintah daerah;
5. Sebagai acuan dalam melaksanakan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tangerang Tahun 2025 ini adalah sebagai berikut.

BAB I : Pendahuluan
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II` : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah
- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah s/d Triwulan I dan Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
- 3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
4.1 Rencana Kerja Program dan Pendanaan 2025
BAB V : Penutup

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

Pelaksanaan evaluasi sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi Pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan sesuai target kinerja DISPORABUDPAR Kabupaten Tangerang tahun 2024 didasarkan pada Renstra Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026 dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026, untuk mengetahui:

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapaianya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.
4.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah s/d Triwulan I dan Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya

Evaluasi kinerja pada pelaksanaan Rencana Kerja sampai dengan Triwulan ke I Tahun 2025 dan Capaian Kinerja Tahun 2023 serta capaian Rencana Strategis sampai dengan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 Sampai Dengan Triwulan I
Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tangerang

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Capaian (%)	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Satuan	Target indikator	Realisasi Indikator
1	2	3	4	5=(4/3)*100	7	8	9	10
2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.514.793.828	2.740.170.145	21.90%	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	%	25	25
2.19.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	85.187.560	3.650.000	4.28%	Persentase Ketersediaan Dokumen perencanaan dan Pelaporan	%	10	10
2.19.01.2.01.0001	*Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	45.670.190	0	0.00%	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1	1
2.19.01.2.01.0006	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	20.194.940	0	0.00%	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	1
2.19.01.2.01.0007	*Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	19.322.430	3.650.000	18.89%	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	1
2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.262.908.834	2.543.705.912	24.79%	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	10	10
2.19.01.2.02.0001	*Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	10.253.935.834	2.541.471.487	24.79%	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	40	39
2.19.01.2.02.0007	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD*	8.973.000	2.234.425	24.90%	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	Laporan	1	1
2.19.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	11.249.580	0	0.00%	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	%	10	10

2.19.01.2.03.0004	*Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD*	11.249.580	0	0.00%	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	-	-
2.19.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	43.690.000	0	0.00%	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	10	10
2.19.01.2.05.0009	*Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi*	43.690.000	0	0.00%	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	-	-
2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.393.670.650	63.769.000	4.58%	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	10	10
2.19.01.2.06.0002	*Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	391.771.800	0	0.00%	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	-	-
2.19.01.2.06.0004	*Penyediaan Bahan Logistik Kantor*	149.790.700	26.201.000	17.49%	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	2
2.19.01.2.06.0005	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	76.164.650	13.413.000	17.61%	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1
2.19.01.2.06.0006	*Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan*	137.500.000	13.000.000	9.45%	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	3	3
2.19.01.2.06.0008	*Fasilitasi Kunjungan Tamu*	113.550.000	8.130.000	7.16%	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	10	10
2.19.01.2.06.0009	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	524.893.500	3.025.000	0.58%	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	10	10
2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	176.674.704	46.870.000	26.53%	Koordinasi dan Konsultasi SKPD	%	10	10
2.19.01.2.08.0001	*Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	11.202.000	0	0.00%	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	-	-
2.19.01.2.08.0004	*Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	165.472.704	46.870.000	28.32%	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	-	-
2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	541.412.500	82.175.233	15.18%	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	%	10	10

2.19.01.2.09.0001	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan*	462.032.500	77.675.233	16.81%	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	14	14
2.19.01.2.09.0006	*Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	55.800.000	4.500.000	8.06%	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	15	15
2.19.01.2.09.0011	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	23.580.000	0	0.00%	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	-	-
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	6.249.370.800	1.990.904.160	31.86%	Persentase pemenuhan Pengembangan Kapasitas Daya saing Kepemudaan	%	8.3	8.3
2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	1.498.093.860	263.404.160	17.58%	Presentasi Pemenuhan Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda	%	8.3	8.3
2.19.02.2.01.0013	*Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota*	292.995.610	83.313.100	28.43%	Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Kegiatan	1	1
2.19.02.2.01.0014	*Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota*	773.540.690	0	0.00%	Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi	Orang	-	-
2.19.02.2.01.0015	*Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota*	431.557.560	180.091.060	41.73%	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	Orang	100	92
2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	4.751.276.940	1.727.500.000	36.36%	Presentase Pemenuhan Pemberdayaan dan Pengembangan pemuda	%	8.3	8.3
2.19.02.2.02.0003	*Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota*	3.515.000.000	1.705.000.000	48.51%	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	Organisasi	-	-
2.19.02.2.02.0004	*Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui*	1.236.276.940	22.500.000	1.82%	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam	Orang	-	-

	kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota				pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota			
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	28.101.069.510	7.182.994.500	25.56%	Persentase pemenuhan Pengembangan Kapasitas Dayasaing Keolahragaan	%	9	9
2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	818.776.840	0	0.00%	Terselenggaraannya kejuaraan multi even dan single event tingkat Kab/kota	%	-	-
2.19.03.2.02.0004	*Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota*	818.776.840	0	0.00%	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Kegiatan	-	-
2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	23.854.564.290	5.366.250.500	22.50%	Terlaksanaannya seleksi atlet daerah	%	6	6
2.19.03.2.03.0006	*Seleksi Atlet Daerah*	159.645.000	140.610.500	88.08%	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	Orang	450	450
2.19.03.2.03.0008	*Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)*	3.212.231.290	235.240.000	7.32%	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science)	Pelatda	2	2
2.19.03.2.03.0009	*Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota*	20.482.688.000	4.990.400.000	24.36%	Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	Orang	-	-
2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	3.427.728.380	1.816.744.000	53.00%	Penyelenggaraan, pengembangan dan pemasalan, festival dan olahraga rekreasi	%	12	12
2.19.03.2.05.0008	*Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat*	292.135.560	0	0.00%	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat	Dokumen	-	-
2.19.03.2.05.0010	*Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional*	3.135.592.820	1.816.744.000	57.94%	Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Lembaga	1	1
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	1.609.556.560	55.500.000	3.45%	Persentase pemenuhan Pengembangan Kebudayaan	%	1.38	-

2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.609.556.560	55.500.000	3.45%	Presentasi pelaksanaan pelindungan, pengembangan, pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan	%	1.38	2.75
2.22.02.2.01.0001	*Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan*	949.089.290	42.900.000	4.52%	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	Objek	1	1
2.22.02.2.01.0002	*Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan*	660.467.270	12.600.000	1.91%	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Orang	0	-
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	348.070.500	1.000.000	0.29%	Persentase Pemenuhan Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	%	3	3
3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	348.070.500	1.000.000	0.29%	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten / Kota	%	3	3
3.26.02.2.01.0005	*Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota*	275.490.000	0	0.00%	Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Lokasi	-	-
3.26.02.2.01.0007	*Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota*	72.580.500	1.000.000	1.38%	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Laporan	2	2
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	866.002.100	0	0.00%	Persentase dokumen hasil penguatan promosi dan laporan kegiatan pariwisata	%	-	-
3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	866.002.100	0	0.00%	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media	%	-	-
3.26.03.2.01.0006	*Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota*	657.677.000	0	0.00%	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Kegiatan	-	-
3.26.03.2.01.0007	*Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri*	208.325.100	0	0.00%	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Promosi	-	-

3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	1.969.822.500	74.477.160	3.78%	Persentase SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	%	15	15
3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	1.969.822.500	74.477.160	3.78%	Peningkatan kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	%	15	15
3.26.05.2.01.0006	*Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif*	144.575.160	74.477.160	51.51%	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Orang	20	20
3.26.05.2.01.0009	*Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata*	1.825.247.340	0	0.00%	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	Orang	-	-

Tabel 2.2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Pencapaian Renstra
Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tangerang
Sampai dengan Tahun 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA									
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Pemuda Binaan	100	90	100	100	100	32	222	2.22
2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah pemuda yang dibina	100	90	100	100	100	32	222	2.22
2.19.02.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	30	140	30	30	100	30	200	6.67
2.19.02.2.01.07	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	Jumlah Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi Penerima Penghargaan	100	8	100	100	100		108	1.08
2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OKP yang diberdayakan	100	98	100	100	100	24	222	2.22
2.19.02.2.02.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	Jumlah Pemuda Kader yang Terfasilitasi Kemitraan dengan Dunia Usaha	100	300	100	100	100	700	1100	11
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Atlit Cabang Olahraga Binaan	37	80	37	37	100	38	155	4.19
2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya kejuaraan olahraga tingkat daerah Kabupaten	37		37	37	100	43	80	2.16

2.19.03.2.02.02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	100		100	100	100	1	101	1.01
2.19.03.2.02.03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	70		70	70	100	1	71	1.01
2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Tersedianya Atlet Berprestasi	100	80	100	100	100	35	215	2.15
2.19.03.2.03.03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Tercapainya Pembinaan dan Pengembangan Atlet Pelajar Berprestasi	115	100	115	115	100	150	365	3.17
2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah target atlet olahraga tradisional yang dibina	100	95	100	100	100	33	228	2.28
2.19.03.2.05.01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Tercapainya Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	12	8	12	15	100	2	25	2.08
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN									
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Event Kebudayaan Yang Dilaksanakan	10	16	10	10	100	33	59	5.9
2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok seni yang dibina	90	16	90	90	100	33	139	1.54
2.22.02.2.01.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	10	16	10	10	100	10	36	3.6
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA									
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Presentase Peningkatan Daya Tarik Pariwisata	23		23	23	100	33	56	2.43
3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Prosentase jumlah pelaku usaha pariwisata yang terbina	100	100	100	100	100	33	233	2.33
3.26.02.2.01.04	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rekomendasi Peningkatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	10		10	10	100	10	20	2
2.19	NON URUSAN									
2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100	100	100	100	100	100	300	3
		Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan	100	100	100	100	100	100	300	3
2.19.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Valuasi kinerja perangkat daerah yang disusun perjumlah dokumen perencanaan penggaran dan evaluasi kinerja	100	100	100	100	100	33	233	2.33
2.19.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	100	6	6	100	4	110	18.33

2.19.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	2	2	2	100	4	8	4
2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan	100	100	100	100	100	32	232	2.32
2.19.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang dibayarkan	100	100	100	100	100	40	240	2.4
2.19.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2	2	2	2	100	4	8	4
2.19.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya laporan barang milik daerah	100	100	100	100	100	33	233	2.33
2.19.01.2.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1	1	1	1	100	1	3	3
2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi umum perangkat daerah	100	100	100	100	100	30	230	2.3
2.19.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya Dokumen dan Peralatan Gedung Kantor	2	2	2	2	100	4	8	4
2.19.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terpenuhinya Dokumen dan Kebutuhan Alat Tulis Kantor	24	24	24	24	100	10	58	2.42
2.19.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya Dokumen Barang Cetakan dan Penggandaan Perkantoran	9	9	9	9	100	10	28	3.11
2.19.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terpenuhinya Dokumen dan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	10	7	10	10	100	30	47	4.7
2.19.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terpenuhinya Pelayan Administrasi Perkantoran	4200	1522	4200	4200	100	48	5770	1.37
2.19.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terpenuhinya Dokumen Pelayan Administrasi Perkantoran	2000	2000	2000	2000	100	200	4200	2.1
2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang	100	100	100	100	100	30	230	2.3
2.19.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya Dokumen Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	1	1	1	100	1	3	3
2.19.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya Dokumen Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	1	1	1	100	1	3	3
2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	100	100	100	30	230	2.3
2.19.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan	Terpenuhinya Dokumen Sarana dan Prasarana Aparatur	14	14	14	14	100	14	42	3

	Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
2.19.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpenuhinya Dokumen Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	4	4	4	4	100	15	23	5.75

Tabel 2.3
Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori
1	Meningkatkan daya saing pemuda	Prosentase peningkatan kapasitas daya saing pemuda	5.12	5.12	100	Baik
		Prosentase atlet yang berprestasi di tingkat provinsi dan nasional	56.48	60,98	107,9	Sangat Baik
		Prosentase Kelompok Kesenian dan Kebudayaan Daerah yang dikembangkan	9.02	8.51	94,3	Cukup
2	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah sektor unggulan	Prosentase peningkatan kunjungan wisatawan	3.95	5.04	127.5	Sangat Baik
3	Meningkatkan akuntabilitas kinerja PD	Nilai AKIP	78.00	-	-	-

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Seiring dengan perkembangan pembangunan dan perubahan paradigma Pemerintah sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, maka setiap Instansi Pemerintah dituntut memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat dan senantiasa mengupayakan peningkatan kinerja. Oleh karena itu diharapkan dapat terwujud sumber daya berkualitas di bidang Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata dalam memberikan pelayanan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai beberapa target kinerja sebagaimana disebutkan dalam RPD Tahun 2024- 2026. Untuk lebih lengkapnya data terkait indikator kinerja Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tangerang pada Renstra 2024-2026, sebagai berikut.

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tangerang

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target IKU	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian				
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	Prosentase Pemuda berprestasi tingkat provinsidan nasional	29.30	27.97	29.07	29.07	29.07	29.30	27.97	7.00	26.50	29.70	
2	Persentase kelompok masyarakat berperan	100.00	22.08	42.03	61.98	81.93	100	22.08	10.03	46.50	81.93	

	aktifdalam olahraga											
3	Persentase atlet yang berprestasi di tingkat provinsi, nasional dan internasional	36.00	32.00	45.00	34.00	47.00	36.0	32.00	0	13.60	74.00	
4	Persentase kelompok kesenian yang aktif	73.97	63.01	65.75	68.49	71.23	73.97	63.01	0	61.65	68.96	
5	Persentase kenaikan jumlah kunjungan wisata	35.00	15.00	20.00	25.00	30.00	35.00	15.00	5.00	20.00	30.00	
6	Nilai AKIP Perangkat Daerah	80.00	65.00	70.00	72.00	73.00	74.00	60.42	77.17	77.17	75.74	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Pembangunan pada segala sektor di wilayah Kabupaten Tangerang mendorong Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata untuk meningkatkan daya saing di masyarakat. Dalam hal tersebut, dibutuhkan pemahaman dan pendalaman terhadap kondisi untuk membantu dalam proses implementasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan. Pada kondisi Kabupaten Tangerang saat ini yang merupakan wilayah dengan masyarakat yang majemuk, diperlukan pendekatan oleh pemerintah dalam pembangunan sosial kemasyarakatan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan daya saing dan mempertahankan karakteristik serta ciri khas Kabupaten Tangerang.

2.3.1 Tingkat Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 27 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tangerang, DISPORABUDPAR Kabupaten Tangerang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah. Dalam melaksanakan tugasnya, DISPORABUDPAR menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pemuda, olahraga, kebudayaan dan pariwisata;
2. Pelaksanaan kebijakan dibidang Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.3.2 Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi

Dalam rangka menyelesaikan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah diantaranya dengan melakukan identifikasi permasalahan dan hambatan yang harus ditangani dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Permasalahan dan hambatan yang dimaksud sebagai berikut:

Tabel 2.3
Permasalahan dan Akar Masalah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1	Belum optimalnya daya saing pemuda dalam pembangunan	Masih rendahnya partisipasi aktif pemuda dalam pembangunan	Kurangnya pembinaan pemuda dalam hal pengembangan kepemimpinan, kepeloporan dan organisasi kepemudaan
		Minimnya Akses Pemuda dalam pengembangan kewirausahaan	Kurangnya pengembangan kewirausahaan pemuda
			Kurangnya kordinasi lintas sektor penyelenggaraan pelayanan kepemudaan dalam pengembangan kewirausahaan pemuda
2	Minimnya prestasi olahraga tingkat Provinsi dan Nasional	Belum optimalnya Pembudayaan Olahraga di masyarakat	Kurangnya partisipasi masyarakat dalam berolahraga sejak dini
			Minimnya kesadaran Masyarakat akan pentingnya olahraga
		Belum optimalnya pembinaan olahraga	Belum adanya pemusatan latihan pada sentra olahraga
			Kurangnya Pembinaan olahraga dalam hal penerapan IPTEK (Sports Science)
			Minimnya tenaga keolahragaan yang bersertifikasi dan profesional
			Tata kelola sarana dan prasarana olahraga yang belum efektif
3	Belum optimalnya Pengembangan Seni Budaya	Belum optimalnya pengembangan dan pemanfaatan kelembagaan seni budaya	Kurangnya pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) yang bergerak (pelaku seni budaya)
			Kurangnya kontribusi pemerintah akan penghargaan terhadap pelaku seni budaya
		Rendahnya minat masyarakat terhadap seni budaya asli daerah	Kurangnya pengenalan dan promosi seni budaya asli daerah pada masyarakat secara luas
			Kurangnya antusiasme masyarakat terhadap penyelenggaraan kesenian dan kebudayaan
		Belum tersedianya sarana prasarana pembinaan seni budaya daerah	Belum tersedianya gedung pertunjukan kesenian kebudayaan
			Belum tersedianya museum seni budaya
			Kurang tersedianya alat pendukung kesenian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat
4	Belum Optimalnya	Rendahnya daya tarik	Kurangnya perencanaan kawasan strategis pariwisata
			Minimnya pengembangan kawasan strategis pariwisata

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	Pengembangan Destinasi Wisata	destinasi parwisata	Minimnya sarana dan prasarana dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata Kabupaten
			Kurangnya tata kelola kawasan strategis pariwisata Kabupaten
		Rendahnya pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual	Minimnya rencana aksi pengembangan ekonomi kreatif
			Kurangnya fasilitasi kekayaan intelektual
			Kurangnya perlindungan hasil kreativitas usaha pariwisata
		Rendahnya Publikasi dan Promosi pariwisata	Kurangnya promosi dan publikasi melalui media cetak, elektronik dan media lainnya baik dalam dan luar negeri
			Kurangnya data pariwisata baik dalam dan luar negeri
		Belum optimalnya pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Kurangnya pengembangan kompetensi SDM pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar dan lanjutan
			Kurangnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata
			Minimnya kompetensi bagi tenaga kerja bidang pariwisata yang tersertifikasi

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Terhadap RKPD Perubahan

Untuk mereview rancangan awal RKPD, terlebih dahulu diuraikan tahapan dalam penyusunan Renja. Secara umum penyusunan Renja DISPORABUDPAR Kabupaten Tangerang diselenggarakan melalui serangkaian tahapan sebagai berikut:

1. Identifikasi kebutuhan dan penyusunan draft Rencana Kerja di Internal DISPORABUDPAR Kabupaten Tangerang;
2. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Tangerang;
3. Penyusunan Rancangan Awal Renja DISPORABUDPAR Kabupaten Tangerang;
4. Pelaksanaan asistensi terhadap Renja DISPORABUDPAR Kabupaten Tangerang;
5. Penyusunan Rancangan Akhir Renja DISPORABUDPAR Kabupaten Tangerang;
6. Penetapan Renja oleh Kepala DISPORABUDPAR Kabupaten Tangerang.

Dari rancangan awal yang telah disusun dalam RKPD 2025 telah disesuaikan dengan perencanaan kinerja DISPORABUDPAR Kabupaten Tangerang. Perencanaan kinerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) DISPORABUDPAR Kabupaten Tangerang, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan.

Dibandingkan dengan renstra DISPORABUDPAR ada perbedaan dengan rancangan awal RKPD. Perubahan tersebut diantaranya terletak pada anggaran yang akan digunakan.

Hal ini sebagai bentuk penyesuaian terhadap kebutuhan pelaksanaan program/kegiatan yang bersangkutan agar dapat mencapai target kinerja yang telah ditetapkan untuk menjawab tantangan serta dinamika yang terjadi. Rumusan program dan kegiatan yang termuat dalam rancangan awal RKPD 2024 secara keseluruhan sudah sesuai dengan rumusan program dan kegiatan yang direncanakan DISPORABUDPAR Kabupaten Tangerang. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2025, disajikan dalam Tabel berikut ini:

Tabel 2.4
Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025
Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Tangerang

Kode					RANCANGAN AWAL RKPD					RANCANGAN ANALISIS KEBUTUHAN				
					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Kebutuhan Dana
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata				44.972.889.051,00	Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata				53.519.492.958,00
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				42.972.889.051,00	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				50.016.898.898,00
2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				41.472.889.051,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				48.206.899.478,00
2	19	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	100 Persen	12.203.137.051,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	100 Persen	13.141.298.238,00
2	19	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Ketersediaan Dokumen perencanaan dan Pelaporan	33 Persen	180.004.000,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Ketersediaan Dokumen perencanaan dan Pelaporan	33 Persen	114.251.800,00
2	19	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	50.004.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	60.895.000,00

						Kel/Desa								
2	19	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	80.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	26.926.800,00
2	19	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	50.000.000,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	26.430.000,00
2	19	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	33 Persen	9.932.389.051,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	33 Persen	10.265.899.834,00
2	19	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/bulan	9.920.389.051,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/bulan	10.253.935.834,00
2	19	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	12.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	4 Laporan	11.964.000,00

												Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		
2	19	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	33 Persen	15.000.000,00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	33 Persen	14.999.700,00
2	19	01	2.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	15.000.000,00	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	14.999.700,00
2	19	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	33 Persen	150.000.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	33 Persen	45.390.000,00
2	19	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	44 Orang	150.000.000,00	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	44 Orang	45.390.000,00
2	19	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	33 Persen	1.153.345.800,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	33 Persen	1.978.935.700,00
2	19	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	96.930.000,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	391.771.800,00

2	19	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	44.029.800,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	149.790.700,00
2	19	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	50.000.000,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	100.086.200,00
2	19	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	30 Dokumen	60.000.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	30 Dokumen	137.500.000,00
2	19	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	48 Laporan	150.000.000,00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	48 Laporan	150.000.000,00
2	19	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 Laporan	752.386.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 Laporan	1.049.787.000,00

						Kel/Desa								
2	19	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Koordinasi dan Konsultasi SKPD	33 Persen	189.792.000,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Koordinasi dan Konsultasi SKPD	33 Persen	180.408.704,00
2	19	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	15.000.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	14.936.000,00
2	19	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	174.792.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	165.472.704,00
2	19	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	33 Persen	582.606.200,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	33 Persen	541.412.500,00
2	19	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	14 Unit	507.206.200,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	14 Unit	462.032.500,00
2	19	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan,	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	50.400.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	55.800.000,00

						Semua Kel/Desa								
2	19	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	25.000.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	23.580.000,00
2	19	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN		Persentase pemenuhan Pengembangan Kapasitas Daya saing Kepemudaan	33 Persen	5.904.252.000,00	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN		Persentase pemenuhan Pengembangan Kapasitas Daya saing Kepemudaan	33 Persen	6.596.887.660,00
2	19	02	2.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota		Presentasi Pemenuhan Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda	33 Persen	1.892.888.000,00	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota		Presentasi Pemenuhan Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda	33 Persen	1.725.043.710,00
2	19	02	2.01	0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	3 Kegiatan	349.778.000,00	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	3 Kegiatan	349.777.610,00
2	19	02	2.01	0014	Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan,	Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi	1500 Orang	949.760.000,00	Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi	1500 Orang	892.266.310,00

						Semua Kel/Desa								
2	19	02	2.01	0015	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	600 Orang	593.350.000,00	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	600 Orang	482.999.790,00
2	19	02	2.02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Presentase Pemenuhan Pemberdayaan dan Pengembangan pemuda	33 Persen	4.011.364.000,00	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Presentase Pemenuhan Pemberdayaan dan Pengembangan pemuda	33 Persen	4.871.843.950,00
2	19	02	2.02	0003	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	3 Organisasi	2.605.000.000,00	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	3 Organisasi	3.515.000.000,00
2	19	02	2.02	0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	70 Orang	1.406.364.000,00	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	70 Orang	1.356.843.950,00
2	19	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN		Persentase pemenuhan Pengembangan	33 Persen	23.365.500.000,00	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA		Persentase pemenuhan Pengembangan	33 Persen	28.468.713.580,00

							Kapasitas Daya Saing Keolahragaan			SAING KEOLAHRAGAAN		Kapasitas Daya Saing Keolahragaan		
2	1 9	0 3	2. 02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Terselenggaraannya kejuaraan multi even dan single event tingkat Kab/kota	10 Persen	600.000.000,00	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Terselenggaraannya kejuaraan multi even dan single event tingkat Kab/kota	10 Persen	859.449.060,00
2	1 9	0 3	2. 02	0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	3 Kegiatan	600.000.000,00	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	3 Kegiatan	859.449.060,00
2	1 9	0 3	2. 03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi		Terlaksanaannya seleksi atlet daerah	30 Persen	20.315.500.000,00	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi		Terlaksanaannya seleksi atlet daerah	30 Persen	24.100.567.650,00
2	1 9	0 3	2. 03	0006	Seleksi Atlet Daerah	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	450 Orang	200.000.000,00	Seleksi Atlet Daerah	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	450 Orang	175.480.000,00
2	1 9	0 3	2. 03	0008	Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science)	2 Pelatda	3.959.000.000,00	Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science)	2 Pelatda	3.419.693.650,00
2	1 9	0 3	2. 03	0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	Kab. Tangerang, Semua Kecama	Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	150 Orang	16.156.500.000,00	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan,	Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan	150 Orang	20.505.394.000,00

						tan, Semua Kel/Desa					Semua Kel/Desa	Diberikan Pengembangan		
2	19	03	2.05		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi		Penyelenggaraan, pengembangan dan pemasalan, festival dan olahraga rekreasi	33 Persen	2.450.000.000,00	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi		Penyelenggaraan, pengembangan dan pemasalan, festival dan olahraga rekreasi	33 Persen	3.508.696.870,00
2	19	03	2.05	0008	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat	1 Dokumen	300.000.000,00	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat	1 Dokumen	306.499.680,00
2	19	03	2.05	0010	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	1 Lembaga	2.150.000.000,00	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	1 Lembaga	3.202.197.190,00
2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				1.500.000.000,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				1.809.999.420,00
2	22	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN		Persentase pemenuhan Pengembangan Kebudayaan	33 Persen	1.500.000.000,00	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN		Persentase pemenuhan Pengembangan Kebudayaan	33 Persen	1.809.999.420,00
2	22	02	2.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Presentasi pelaksanaan pelindungan, pengembangan, pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan	33 Persen	1.500.000.000,00	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Presentasi pelaksanaan pelindungan, pengembangan, pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan	33 Persen	1.809.999.420,00
2	22	02	2.01	0001	Pelindungan, Pengembangan,	Kab. Tangera	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan	12 Objek	841.500.000,00	Pelindungan, Pengembangan,	Kab. Tangerang,	Jumlah Objek Pemajuan	12 Objek	1.051.499.550,00

					Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	ng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan			Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan		
2	22	02	2.01	0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	150 Orang	658.500.000,00	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	150 Orang	758.499.870,00
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				2.000.000.000,00	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				3.502.594.060,00
3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				2.000.000.000,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				3.502.594.060,00
3	26	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA		Persentase pemenuhan Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	33 Persen	200.000.000,00	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA		Persentase pemenuhan Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	33 Persen	408.490.000,00
3	26	02	2.01		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota		Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten / Kota	33 Persen	200.000.000,00	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota		Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten / Kota	33 Persen	408.490.000,00
3	26	02	2.01	0005	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	3 Lokasi	70.000.000,00	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	3 Lokasi	275.490.000,00
3	26	02	2.01	0007	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Kab. Tangerang, Semua	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan	20 Laporan	130.000.000,00	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan,	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi	20 Laporan	133.000.000,00

						Kecamatan, Semua Kel/Desa	Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota				Semua Kel/Desa	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota		
3	26	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA		Prosentase Pemenuhan Promosi Pariwisata	33 Persen	400.000.000,00	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA		Prosentase Pemenuhan Promosi Pariwisata	33 Persen	908.297.140,00
3	26	03	2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media	32 Persen	400.000.000,00	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media	32 Persen	908.297.140,00
3	26	03	2.01	0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	4 Kegiatan	100.000.000,00	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	4 Kegiatan	668.195.140,00
3	26	03	2.01	0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	5 Promosi	300.000.000,00	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	5 Promosi	240.102.000,00
3	26	05			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF		Persentase SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	33 Persen	1.400.000.000,00	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF		Persentase SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	33 Persen	2.185.806.920,00
3	26	05	2.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar		Peningkatan kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	33 Persen	1.400.000.000,00	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan		Peningkatan kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	33 Persen	2.185.806.920,00

										Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar				
3	26	05	2.01	0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	20 Orang	50.000.000,00	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	20 Orang	177.586.050,00
3	26	05	2.01	0009	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	30 Orang	1.350.000.000,00	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	30 Orang	2.008.220.870,00

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana program merupakan cara untuk mendukung arah kebijakan yang telah ditetapkan. Dinas Pemuda Olaraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tangerang dalam mendukung arah kebijakan telah menetapkan rencana program utama untuk program tiga tahun ke depan. Adapun rencana program prioritas dimaksud dalam RPJMD Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tangerang adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
3. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
4. Program Pengembangan Kebudayaan
5. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
6. Program Pemasaran Pariwisata
7. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif

Selain program prioritas dimaksud dalam penyusunan renja DISPORABUDPAR Tahun 2025 juga memperhatikan usulan bottom up melalui forum musrenbang tingkat desa dan kecamatan juga aspirasi/pokir dari DPRD. Hasil musrenbang tingkat Kecamatan terdapat usulan yang menjadi kewenangan DISPORABUDPAR. Usulan program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari para Pemangku Kepentingan
Tahun 2025

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	Pelatihan Keterampilan	Kecamatan Cisoka	Orang atau Peserta Pelatihan Keterampilan di Kecamatan Cisoka	100.000.000	Dilaksanakan pada Triwulan ke 4 bulan Oktober
2	Pelatihan Keterampilan	Kecamatan Cisoka	Orang atau Peserta Pelatihan Keterampilan di Kecamatan Cisoka	100.000.000	Dilaksanakan pada Triwulan ke 4 bulan Oktober
3	Pelatihan Usaha Mikro	Kecamatan Cisoka	Orang atau Peserta Pelatihan Usaha Mikro di Kecamatan Cisoka	100.000.000	Dilaksanakan pada Triwulan ke 4 bulan Oktober

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional dan Pemerintah Daerah

Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata masih memiliki faktor-faktor

penghambat, diantaranya adalah:

1. Masih tingginya peredaran narkoba dikalangan generasi muda;
2. Masih rendahnya kemampuan pemuda dalam bidang kewirausahaan;
3. Minimnya Pengelolaan prasarana olahraga di Kabupaten Tangerang;
4. Masih rendahnya animo dan peran serta masyarakat terhadap pelestarian dan pengembangan kesenian tradisional;
5. Belum adanya gedung kesenian di Kabupaten Tangerang;
6. Belum adanya Obyek Daerah Tujuan Wisata (ODTW) di Kabupaten Tangerang;
7. Belum optimalnya promosi wisata;

Untuk mendorong faktor-faktor penghambat tersebut, Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan

dan Pariwisata memiliki faktor pendukung yaitu:

1) Banyaknya generasi muda memiliki potensi untuk digali dan dikembangkan;
2) Tersedianya lahan untuk pembangunan gedung olahraga dan gedung budaya;
3) Masyarakat yang majemuk (beragam) dapat menghasilkan kekayaan budaya lokal yang unik dan indah merupakan potensi yang besar untuk digali, dibina dan dilestarikan menjadi asset daerah sekaligus menjanjikan bagi perkembangan promosi pariwisata (*Tourism Information Centre*);
4) Semakin disadarinya manfaat seni dan budaya bagi sebagai salah satu upaya dalam pembentukan watak disiplin, produktivitas, prestasi, budaya kerja dan kepribadian bangsa serta bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat;
5) Majunya telekomunikasi, transportasi dan teknologi informasi dapat dimanfaatkan untuk memberikan informasi mengenai bidang kepemudaan dan olahraga, kebudayaan dan pariwisata baik sebagai hiburan, tantangan, sarana rekreasi dan wisata.
6) Adanya kawasan pantai yang berpotensi seperti:

- Tanjung Pasir di Teluk Naga;
- Tanjung Kait di Kecamatan Mauk yang tidak hanya memiliki obyek wisata pantai tapi juga obyek wisata lainnya yaitu wisata budaya/sejarah, wisata kuliner, wisata olahraga rekreasi yaitu pemancingan;
- Dadap di Kecamatan Kosambi;
- Muara Ujung.

7) Pulau Cangkir yang mengedepankan unsur pedesaan di Kecamatan Kronjo.

4.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Untuk mewujudkan misi, disusunlah tujuan yang berisi pernyataan yang perlu dilakukan untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi selama lima tahun yang didasarkan pada isu-isu analisis strategis dan indikator kinerja tujuan yang menjadi tolak ukur / ukuran tingkat keberhasilan pencapaian tujuan yang akan dicapai selama lima tahun dan secara bertahap dapat diurai pencapaiannya setiap tahun. Berdasarkan lima misi yang telah ditetapkan, maka diurai masing masing misi dengan pernyataan tujuan dan indikator tujuannya.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari tujuan yang diformulasikan spesifik, mudah dicapai, rasional memperhatikan isu strategis daerah, disertakan pula indikator kinerja sasaran, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang akan dicapai selama lima tahun dan secara bertahap dapat diurai pencapaiannya setiap tahun.

Berdasarkan pernyataan tujuan dan indikator tujuan yang telah ditetapkan, maka dilakukan cascading down yaitu menurunkan rencana pencapaian indikator tujuan kepada indikator sasaran yang memberikan kontribusi terhadap pencapaian indikator tujuan yang hendak dicapai target kinerjanya.

1. Tujuan
   1) Meningkatkan taraf kebugaran jasmani bagi generasi muda untuk mencapai prestasi olahraga yang optimal
   2) Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam melestarikan kebudayaan
   3) Meningkatkan peran serta masyarakat dan generasi muda dalam pengembangan serta peningkatan daya saing objek daerah tujuan wisata.
   4) Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
   5) Meningkatkan peran serta pemuda dalam pembangunan daerah
2. Sasaran Strategis
   1) Meningkatnya partisipasi masyarakat dala berolahraga
   2) Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kebudayaan
   3) Meningkatnya Kinerja Bidang Pariwisata
   4) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
   5) Meningkatnya prestasi pemuda

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Satuan	Kondisi Awal Kinerja		Target Capaian			Kondisi Akhir
					2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatkan DayaSaing Pemuda	Prosentase Peningkatan Kapasitas Daya saing Pemuda	Persen	0.51	3.10	5.12	6.93	8.28	**8.28**

			Prosentase atlet yang berprestasi di tingkat provinsi dan nasional	Persen	70.12	48.42	56.48	69.49	71.58	**71.58**
			Prosentase Kelompok Kesenian dan Kebudayaan Daerah yang dikembangkan	Persen	5.74	7.38	9.02	10.66	12.30	**12.30**
2	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang berkelanjutan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara komprehensif	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah Sektor Unggulan	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan	Persen	3.09	3.36	3.95	4.57	5.29	**5.29**
3	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	Nilai AKIP	Persen	73.00	74.00	78.00	79.00	80.00	**80.00**

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tangerang dapat digambarkan dalam Indikator Kinerja Dinas sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja Utama Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata tersaji dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.2.
Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal Kinerja		Target			Kondisi Akhir
			2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Prosentase Peningkatan Kapasitas Daya saing Pemuda	Persen	0.51	3.10	5.12	6.93	8.28	**8.28**
2	Prosentase atlet yang berprestasi di tingkat provinsi dan nasional	Persen	70.12	48.42	56.48	69.49	71.58	**71.58**
3	Prosentase Kelompok Kesenian dan Kebudayaan Daerah yang dikembangkan	Persen	5.74	7.38	9.02	10.66	12.30	**12.30**

4	Prosentase destinasi wisata yang dikembangkan	Persen	3.09	3.36	3.95	4.57	5.29	**5.29**

3.3 Program dan Kegiatan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang kemudian dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta dimutakhirkan kembali dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Program dan Kegiatan Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tangerang untuk jangka menengah periode 2024-2026, terdiri dari :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
    1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
        (1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
        (2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
        (3) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
        (1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
        (2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
    3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
        (1) Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
    4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
        (1) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
    5) Administrasi Umum Perangkat Daerah
        (1) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
        (2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
        (3) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
        (4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
        (5) Fasilitasi Kunjungan Tamu
        (6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
    6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
        (1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
        (2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
    7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

(1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
(2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
(3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
   1) Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota
      (1) Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota
      (2) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota
      (3) Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota
   2) Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
      (1) Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota
      (2) Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota
3. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
   1) Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
      (1) Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota
   2) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi
      (1) Seleksi Atlet Daerah
      (2) Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (*Sport Science)*
      (3) Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota
   3) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi
      (1) Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat
      (2) Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional
4. Program Pengembangan Kebudayaan
   1) Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
      (1) Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan

(2) Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan

5. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
   1) Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
      (1) Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota
      (2) Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
6. Program Pemasaran Pariwisata
   1) Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
      (1) Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota
      (2) Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri
7. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
   1) Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
      (1) Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif
      (2) Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata

Tabel 3.3
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tangerang

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun berjalan)					Prakiraan Maju (Renja Tahun 2026)	
							Kelompok Sasaran	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
2					3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata					Rp 53,519,492,958	APBD		Rp 58,871,442,254
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					Rp 50,016,898,898	APBD		Rp 55,018,588,788
2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					Rp 48,206,899,478	APBD		Rp 53,027,589,426
2	19	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan			100 Persen	Rp 13,141,298,238	APBD	100 Persen	Rp 14,455,428,062
2	19	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen perencanaan dan Pelaporan	Aparatur Sipil Negara		33 Persen	Rp 114,251,800	APBD	33 Persen	Rp 125,676,980
2	19	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Aparatur Sipil Negara	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Dokumen	Rp 60,895,000	APBD	4 Dokumen	Rp 66,984,500
2	19	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Aparatur Sipil Negara	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Laporan	Rp 26,926,800	APBD	4 Laporan	Rp 29,619,480
2	19	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Aparatur Sipil Negara	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Laporan	Rp 26,430,000	APBD	4 Laporan	Rp 29,073,000

2	19	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Aparatur Sipil Negara		33 Persen	Rp 10,265,899,834	APBD	33 Persen	Rp 11,292,489,817
2	19	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Aparatur Sipil Negara	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40 Orang/ Bulan	Rp 10,253,935,834	APBD	40 Orang/ Bulan	Rp 11,279,329,417
2	19	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Aparatur Sipil Negara	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Laporan	Rp 11,964,000	APBD	4 Laporan	Rp 13,160,400
2	19	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Aparatur Sipil Negara		33 Persen	Rp 14,999,700	APBD	33 Persen	Rp 16,499,670
2	19	01	2.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Aparatur Sipil Negara	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	Rp 14,999,700	APBD	1 Laporan	Rp 16,499,670
2	19	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Aparatur Sipil Negara		33 Persen	Rp 45,390,000	APBD	33 Persen	Rp 49,929,000
2	19	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Aparatur Sipil Negara	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	44 Orang	Rp 45,390,000	APBD	44 Orang	Rp 49,929,000
2	19	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Aparatur Sipil Negara		33 Persen	Rp 1,978,935,700	APBD	33 Persen	Rp 2,176,829,270
2	19	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Aparatur Sipil Negara	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Paket	Rp 391,771,800	APBD	4 Paket	Rp 430,948,980

2	19	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Aparatur Sipil Negara	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Paket	Rp 149,790,700	APBD	10 Paket	Rp 164,769,770
2	19	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Aparatur Sipil Negara	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Paket	Rp 100,086,200	APBD	10 Paket	Rp 110,094,820
2	19	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Aparatur Sipil Negara	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30 Dokumen	Rp 137,500,000	APBD	30 Dokumen	Rp 151,250,000
2	19	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Aparatur Sipil Negara	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	48 Laporan	Rp 150,000,000	APBD	48 Laporan	Rp 165,000,000
2	19	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Aparatur Sipil Negara	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200 Laporan	Rp 1,049,787,000	APBD	200 Laporan	Rp 1,154,765,700
2	19	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Aparatur Sipil Negara		33 Persen	Rp 180,408,704	APBD	33 Persen	Rp 198,449,574
2	19	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Aparatur Sipil Negara	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	Rp 14,936,000	APBD	1 Laporan	Rp 16,429,600
2	19	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Aparatur Sipil Negara	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan	1 Laporan	Rp 165,472,704	APBD	1 Laporan	Rp 182,019,974

								, Semua Kel/Desa					
2	19	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Aparatur Sipil Negara		33 Persen	Rp 541,412,500	APBD	33 Persen	Rp 595,553,750
2	19	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Aparatur Sipil Negara	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14 Unit	Rp 462,032,500	APBD	14 Unit	Rp 508,235,750
2	19	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Aparatur Sipil Negara	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 Unit	Rp 55,800,000	APBD	15 Unit	Rp 61,380,000
2	19	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Aparatur Sipil Negara	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Unit	Rp 23,580,000	APBD	2 Unit	Rp 25,938,000
2	19	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase pemenuhan Pengembangan Kapasitas Daya saing Kepemudaan			33 Persen	Rp 6,596,887,660	APBD	33 Persen	Rp 7,256,576,426
2	19	02	2.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Presentasi Pemenuhan Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda	Masyarakat		33 Persen	Rp 1,725,043,710	APBD	33 Persen	Rp 1,897,548,081
2	19	02	2.01	0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota	Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Masyarakat	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Kegiatan	Rp 349,777,610	APBD	3 Kegiatan	Rp 384,755,371
2	19	02	2.01	0014	Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota	Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi	Masyarakat	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1500 Orang	Rp 892,266,310	APBD	1500 Orang	Rp 981,492,941

2	19	02	2.01	0015	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	Masyarakat		600 Orang	Rp 482,999,790	APBD	600 Orang	Rp 531,299,769
2	19	02	2.02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Pemenuhan Pemberdayaan dan Pengembangan pemuda	Masyarakat		33 Persen	Rp 4,871,843,950	APBD	33 Persen	Rp 5,359,028,345
2	19	02	2.02	0003	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	Masyarakat	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Organisasi	Rp 3,515,000,000	APBD	3 Organisasi	Rp 3,866,500,000
2	19	02	2.02	0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Masyarakat	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70 Orang	Rp 1,356,843,950	APBD	70 Orang	Rp 1,492,528,345
2	19	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase pemenuhan Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan			33 Persen	Rp 28,468,713,580	APBD	33 Persen	Rp 31,315,584,938
2	19	03	2.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaraannya kejuaraan multi even dan single event tingkat Kab/kota	Masyarakat		10 Persen	Rp 859,449,060	APBD	10 Persen	Rp 945,393,966
2	19	03	2.02	0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Masyarakat	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Kegiatan	Rp 859,449,060	APBD	3 Kegiatan	Rp 945,393,966
2	19	03	2.03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Terlaksanaannya seleksi atlet daerah	Masyarakat		30 Persen	Rp 24,100,567,650	APBD	30 Persen	Rp 26,510,624,415
2	19	03	2.03	0006	Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	Masyarakat	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	450 Orang	Rp 175,480,000	APBD	450 Orang	Rp 193,028,000
2	19	03	2.03	0008	Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu	Masyarakat	Kab. Tangerang, Semua	2 Pelatda	Rp 3,419,693,650	APBD	2 Pelatda	Rp 3,761,663,015

						Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science)		Kecamatan, Semua Kel/Desa					
2	19	03	2.03	0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	Masyarakat	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150 Orang	Rp 20,505,394,000	APBD	150 Orang	Rp 22,555,933,400
2	19	03	2.05		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Penyelenggaraan, pengembangan dan pemasalan, festival dan olahraga rekreasi	Masyarakat		33 Persen	Rp 3,508,696,870	APBD	33 Persen	Rp 3,859,566,557
2	19	03	2.05	0008	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat	Masyarakat	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	Rp 306,499,680	APBD	1 Dokumen	Rp 337,149,648
2	19	03	2.05	0010	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Masyarakat	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Lembaga	Rp 3,202,197,190	APBD	1 Lembaga	Rp 3,522,416,909
2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					Rp 1,809,999,420	APBD		Rp 1,990,999,362
2	22	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase pemenuhan Pengembangan Kebudayaan			33 Persen	Rp 1,809,999,420	APBD	33 Persen	Rp 1,990,999,362
2	22	02	2.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Presentasi pelaksanaan pelindungan, pengembangan, pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan	Masyarakat		33 Persen	Rp 1,809,999,420	APBD	33 Persen	Rp 1,990,999,362
2	22	02	2.01	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	Masyarakat	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Objek	Rp 1,051,499,550	APBD	12 Objek	Rp 1,156,649,505
2	22	02	2.01	0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Masyarakat	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan	150 Orang	Rp 758,499,870	APBD	150 Orang	Rp 834,349,857

								, Semua Kel/Desa					
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					Rp 3,502,594,060	APBD		Rp 3,852,853,466
3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					Rp 3,502,594,060	APBD		Rp 3,852,853,466
3	26	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase pemenuhan Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata			33 Persen	Rp 408,490,000	APBD	33 Persen	Rp 449,339,000
3	26	02	2.01		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten / Kota	Masyarakat		33 Persen	Rp 408,490,000	APBD	33 Persen	Rp 449,339,000
3	26	02	2.01	0005	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Masyarakat	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Lokasi	Rp 275,490,000	APBD	3 Lokasi	Rp 303,039,000
3	26	02	2.01	0007	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Masyarakat	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20 Laporan	Rp 133,000,000	APBD	20 Laporan	Rp 146,300,000
3	26	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Prosentase Pemenuhan Promosi Pariwisata			33 Persen	Rp 908,297,140	APBD	33 Persen	Rp 999,126,854
3	26	03	2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media	Masyarakat		32 Persen	Rp 908,297,140	APBD	32 Persen	Rp 999,126,854
3	26	03	2.01	0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Masyarakat	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Kegiatan	Rp 668,195,140	APBD	4 Kegiatan	Rp 735,014,654
3	26	03	2.01	0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Masyarakat	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Promosi	Rp 240,102,000	APBD	5 Promosi	Rp 264,112,200
3	26	05			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			33 Persen	Rp 2,185,806,920	APBD	33 Persen	Rp 2,404,387,612

3	26	05	2.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Peningkatan kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Masyarakat		33 Persen	Rp 2,185,806,920	APBD	33 Persen	Rp 2,404,387,612
3	26	05	2.01	0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Masyarakat	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20 Orang	Rp 177,586,050	APBD	20 Orang	Rp 195,344,655
3	26	05	2.01	0009	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	Masyarakat	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30 Orang	Rp 2,008,220,870	APBD	30 Orang	Rp 2,209,042,957

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Rencana Kerja Program dan Pendanaan Tahun 2024

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD tahun 2025 Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tangerang sebagaimana terlihat pada Tabel berikut :

Tabel 4.1.
Rencana Kerja dan Pendanaan DISPORABUDPAR
Kabupaten Tangerang Tahun 2025 (Sebelum Perubahan)

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	APBD 2025	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
												Nasional	Daerah		
1	2					3	4	8	11	13	14	15	16	17	20
						Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata			53.519.492.958,00						
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			50.016.898.898,00						
	2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			48.206.899.478,00						
1	2	19	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	100 Persen	13.141.298.238,00						
	2	19	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen perencanaan dan Pelaporan	33 Persen	114.251.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Aparatur Sipil Negara	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2	19	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	60.895.000,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik		DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2	19	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	26.926.800,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik		DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2	19	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									

							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	26.430.000,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik		DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2	19	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	33 Persen	10.265.899.834,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Aparatur Sipil Negara	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2	19	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/bulan	10.253.935.834,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik		DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2	19	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	11.964.000,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik		DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2	19	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	33 Persen	14.999.700,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Aparatur Sipil Negara	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2	19	01	2.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD									
							Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	14.999.700,00	Kab. Tangerang, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi,	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola		DINAS PEMUDA, OLAH RAGA,

										Kecamatan, Semua Kel/Desa		serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemerintahan yang Baik		KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2	19	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	33 Persen	45.390.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Aparatur Sipil Negara	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2	19	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	44 Orang	45.390.000,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik		DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2	19	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	33 Persen	1.978.935.700,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Aparatur Sipil Negara	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2	19	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	391.771.800,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik		DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2	19	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	149.790.700,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik		DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

												korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.			
	2	19	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	100.086.200,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik		DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2	19	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	30 Dokumen	137.500.000,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik		DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2	19	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	48 Laporan	150.000.000,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik		DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2	19	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 Laporan	1.049.787.000,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik		DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2	19	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Koordinasi dan Konsultasi SKPD	33 Persen	180.408.704,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba,	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Aparatur Sipil Negara	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

												judi, dan penyeludupan.			
	2	19	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	14.936.000,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik		DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2	19	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	165.472.704,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik		DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2	19	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	33 Persen	541.412.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Aparatur Sipil Negara	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2	19	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	14 Unit	462.032.500,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik		DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2	19	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	55.800.000,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik		DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

	2	19	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	23.580.000,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik		DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2	2	19	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase pemenuhan Pengembangan Kapasitas Daya saing Kepemudaan	33 Persen	6.596.887.660,00						
	2	19	02	2.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Presentasi Pemenuhan Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda	33 Persen	1.725.043.710,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2	19	02	2.01	0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota									
							Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	3 Kegiatan	349.777.610,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia		DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2	19	02	2.01	0014	Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota									
							Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi	1500 Orang	892.266.310,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi,	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia		DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN

										Semua Kel/Desa		pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.			DAN PARIWISATA
	2	19	02	2.01	0015	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota									
							Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	600 Orang	482.999.790,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia		DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2	19	02	2.02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Pemenuhan Pemberdayaan dan Pengembangan pemuda	33 Persen	4.871.843.950,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2	19	02	2.02	0003	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota									
							Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	3 Organisasi	3.515.000.000,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia		DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

												penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.			
	2	19	02	2.02	0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota									
							Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	70 Orang	1.356.843.950,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia		DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3	2	19	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase pemenuhan Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	33 Persen	28.468.713.580,00						
	2	19	03	2.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaraannya kejuaraan multi even dan single event tingkat Kab/kota	10 Persen	859.449.060,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2	19	03	2.02	0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota									
							Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	3 Kegiatan	859.449.060,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia		DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

												gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.			
	2	19	03	2.03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Terlaksanaannya seleksi atlet daerah	30 Persen	24.100.567.650,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2	19	03	2.03	0006	Seleksi Atlet Daerah									
							Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	450 Orang	175.480.000,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia		DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2	19	03	2.03	0008	Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)									
							Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science)	2 Pelatda	3.419.693.650,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia		DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

												dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.			
	2	19	03	2.03	0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota									
							Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	150 Orang	20.505.394.000,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia		DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2	19	03	2.05		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Penyelenggaraan, pengembangan dan pemasalan, festival dan olahraga rekreasi	33 Persen	3.508.696.870,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2	19	03	2.05	0008	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat									
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat	1 Dokumen	306.499.680,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia		DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2	19	03	2.05	0010	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional									

							Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	1 Lembaga	3.202.197.190,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia		DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			1.809.999.420,00						
4	2	22	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase pemenuhan Pengembangan Kebudayaan	33 Persen	1.809.999.420,00						
	2	22	02	2.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Presentasi pelaksanaan pelindungan, pengembangan, pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan	33 Persen	1.809.999.420,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia	Masyarakat	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2	22	02	2.01	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan									
							Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	12 Objek	1.051.499.550,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia		DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2	22	02	2.01	0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan									
							Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	150 Orang	758.499.870,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia		DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

												peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.			
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			3.502.594.060,00						
	3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA			3.502.594.060,00						
5	3	26	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase pemenuhan Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	33 Persen	408.490.000,00						
	3	26	02	2.01		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten / Kota	33 Persen	408.490.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Perekonomian Masyarakat	Masyarakat	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3	26	02	2.01	0005	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota									
							Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	3 Lokasi	275.490.000,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Perekonomian Masyarakat		DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3	26	02	2.01	0007	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota									
							Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	20 Laporan	133.000.000,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong	Meningkatkan Perekonomian Masyarakat		DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

												kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.			
6	3	26	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Prosentase Pemenuhan Promosi Pariwisata	33 Persen	908.297.140,00						
	3	26	03	2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media	32 Persen	908.297.140,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Perekonomian Masyarakat	Masyarakat	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3	26	03	2.01	0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota									
							Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	4 Kegiatan	668.195.140,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Perekonomian Masyarakat		DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3	26	03	2.01	0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri									
							Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	5 Promosi	240.102.000,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan,	Meningkatkan Perekonomian Masyarakat		DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

												mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.			
7	3	26	05			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	33 Persen	2.185.806.920,00						
	3	26	05	2.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Peningkatan kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	33 Persen	2.185.806.920,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Perekonomian Masyarakat	Masyarakat	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3	26	05	2.01	0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif									
							Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	20 Orang	177.586.050,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Perekonomian Masyarakat		DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3	26	05	2.01	0009	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata									
							Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	30 Orang	2.008.220.870,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong	Meningkatkan Perekonomian Masyarakat		DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

												kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.				

Tabel 4.2.
Rencana Kerja dan Pendanaan Perubahan DISPORABUDPAR
Kabupaten Tangerang Tahun 2025 (Setelah Perubahan – Rasionalisasi)

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2025 (Tahun berjalan)										
								Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana	
						Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata									Rp 53,519,492,958	Rp 51,658,685,798	(1,860,807,160)	APBD	APBD
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									Rp 50,016,898,898	Rp 48,474,790,698	(1,542,108,200)	APBD	APBD
2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA									Rp 48,206,899,478	Rp 46,865,234,138	(1,341,665,340)	APBD	APBD
2	19	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan					100 Persen	100 Persen	Rp 13,141,298,238	Rp 12,514,793,828	(626,504,410)	APBD	APBD
2	19	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen perencanaan dan Pelaporan	Persentase Ketersediaan Dokumen perencanaan dan Pelaporan	Aparatur Sipil Negara	Aparatur Sipil Negara			33 Persen	33 Persen	Rp 114,251,800	Rp 85,187,560	(29,064,240)	APBD	APBD
2	19	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Aparatur Sipil Negara	Aparatur Sipil Negara	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Dokumen	4 Dokumen	Rp 60,895,000	Rp 45,670,190	(15,224,810)	APBD	APBD
2	19	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Aparatur Sipil Negara	Aparatur Sipil Negara	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan,	4 Laporan	4 Laporan	Rp 26,926,800	Rp 20,194,940	(6,731,860)	APBD	APBD

						Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				Semua Kel/Desa							
2	19	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Aparatur Sipil Negara	Aparatur Sipil Negara	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Laporan	4 Laporan	Rp 26,430,000	Rp 19,322,430	(7,107,570)	APBD	APBD
2	19	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Aparatur Sipil Negara	Aparatur Sipil Negara			33 Persen	33 Persen	Rp 10,265,899,834	Rp 10,262,908,834	(2,991,000)	APBD	APBD
2	19	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Aparatur Sipil Negara	Aparatur Sipil Negara	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40 Orang/ Bulan	40 Orang/ Bulan	Rp 10,253,935,834	Rp 10,253,935,834	-	APBD	APBD
2	19	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Aparatur Sipil Negara	Aparatur Sipil Negara	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Laporan	4 Laporan	Rp 11,964,000	Rp 8,973,000	(2,991,000)	APBD	APBD
2	19	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Aparatur Sipil Negara	Aparatur Sipil Negara			33 Persen	33 Persen	Rp 14,999,700	Rp 11,249,580	(3,750,120)	APBD	APBD
2	19	01	2.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian	Aparatur Sipil Negara	Aparatur Sipil Negara	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan,	Kab. Tangerang, Semua	1 Laporan	1 Laporan	Rp 14,999,700	Rp 11,249,580	(3,750,120)	APBD	APBD

						Barang Milik Daerah pada SKPD	Barang Milik Daerah pada SKPD			Semua Kel/Desa	Kecamatan, Semua Kel/Desa							
2	19	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Aparatur Sipil Negara	Aparatur Sipil Negara			33 Persen	33 Persen	Rp 45,390,000	Rp 43,690,000	(1,700,000)	APBD	APBD
2	19	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Aparatur Sipil Negara	Aparatur Sipil Negara	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	44 Orang	44 Orang	Rp 45,390,000	Rp 43,690,000	(1,700,000)	APBD	APBD
2	19	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Aparatur Sipil Negara	Aparatur Sipil Negara			33 Persen	33 Persen	Rp 1,978,935,700	Rp 1,393,670,650	(585,265,050)	APBD	APBD
2	19	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Aparatur Sipil Negara	Aparatur Sipil Negara	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Paket	4 Paket	Rp 391,771,800	Rp 391,771,800	-	APBD	APBD
2	19	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Aparatur Sipil Negara	Aparatur Sipil Negara	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Paket	10 Paket	Rp 149,790,700	Rp 149,790,700	-	APBD	APBD
2	19	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Aparatur Sipil Negara	Aparatur Sipil Negara	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Paket	10 Paket	Rp 100,086,200	Rp 76,164,650	(23,921,550)	APBD	APBD

2	19	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Aparatur Sipil Negara	Aparatur Sipil Negara	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30 Dokumen	30 Dokumen	Rp 137,500,000	Rp 137,500,000	-	APBD	APBD
2	19	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Aparatur Sipil Negara	Aparatur Sipil Negara	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	48 Laporan	48 Laporan	Rp 150,000,000	Rp 113,550,000	(36,450,000)	APBD	APBD
2	19	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Aparatur Sipil Negara	Aparatur Sipil Negara	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200 Laporan	200 Laporan	Rp 1,049,787,000	Rp 524,893,500	(524,893,500)	APBD	APBD
2	19	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Aparatur Sipil Negara	Aparatur Sipil Negara			33 Persen	33 Persen	Rp 180,408,704	Rp 176,674,704	(3,734,000)	APBD	APBD
2	19	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Aparatur Sipil Negara	Aparatur Sipil Negara	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	1 Laporan	Rp 14,936,000	Rp 11,202,000	(3,734,000)	APBD	APBD
2	19	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Aparatur Sipil Negara	Aparatur Sipil Negara	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	1 Laporan	Rp 165,472,704	Rp 165,472,704	-	APBD	APBD
2	19	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan	Aparatur Sipil Negara	Aparatur Sipil Negara			33 Persen	33 Persen	Rp 541,412,500	Rp 541,412,500	-	APBD	APBD

						Barang Milik Daerah	Barang Milik Daerah										
2	19	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Aparatur Sipil Negara	Aparatur Sipil Negara	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14 Unit	14 Unit	Rp 462,032,500	Rp 462,032,500	-	APBD	APBD
2	19	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Aparatur Sipil Negara	Aparatur Sipil Negara	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 Unit	15 Unit	Rp 55,800,000	Rp 55,800,000	-	APBD	APBD
2	19	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Aparatur Sipil Negara	Aparatur Sipil Negara	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Unit	2 Unit	Rp 23,580,000	Rp 23,580,000	-	APBD	APBD
2	19	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase pemenuhan Pengembangan Kapasitas Daya saing Kepemudaan	Persentase pemenuhan Pengembangan Kapasitas Daya saing Kepemudaan					33 Persen	33 Persen	Rp 6,596,887,660	Rp 6,249,370,800	(347,516,860)	APBD	APBD
2	19	02	2.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Presentasi Pemenuhan Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda	Presentasi Pemenuhan Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda	Masyarakat	Masyarakat			33 Persen	33 Persen	Rp 1,725,043,710	Rp 1,498,093,860	(226,949,850)	APBD	APBD
2	19	02	2.01	0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota	Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua	3 Kegiatan	3 Kegiatan	Rp 349,777,610	Rp 292,995,610	(56,782,000)	APBD	APBD

											Kel/Desa						
2	19	02	2.01	0014	Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota	Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi	Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1500 Orang	1500 Orang	Rp 892,266,310	Rp 773,540,690	(118,725,620)	APBD	APBD
2	19	02	2.01	0015	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	Masyarakat	Masyarakat			600 Orang	600 Orang	Rp 482,999,790	Rp 431,557,560	(51,442,230)	APBD	APBD
2	19	02	2.02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Pemenuhan Pemberdayaan dan Pengembangan pemuda	Presentase Pemenuhan Pemberdayaan dan Pengembangan pemuda	Masyarakat	Masyarakat			33 Persen	33 Persen	Rp 4,871,843,950	Rp 4,751,276,940	(120,567,010)	APBD	APBD
2	19	02	2.02	0003	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Organisasi	3 Organisasi	Rp 3,515,000,000	Rp 3,515,000,000	-	APBD	APBD
2	19	02	2.02	0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70 Orang	70 Orang	Rp 1,356,843,950	Rp 1,236,276,940	(120,567,010)	APBD	APBD
2	19	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase pemenuhan Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase pemenuhan Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan					33 Persen	33 Persen	Rp 28,468,713,580	Rp 28,101,069,510	(367,644,070)	APBD	APBD

2	19	03	2.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaraannya kejuaraan multi even dan single event tingkat Kab/kota	Terselenggaraannya kejuaraan multi even dan single event tingkat Kab/kota	Masyarakat	Masyarakat			10 Persen	10 Persen	Rp 859,449,060	Rp 818,776,840	(40,672,220)	APBD	APBD
2	19	03	2.02	0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Kegiatan	3 Kegiatan	Rp 859,449,060	Rp 818,776,840	(40,672,220)	APBD	APBD
2	19	03	2.03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Terlaksanaannya seleksi atlet daerah	Terlaksanaannya seleksi atlet daerah	Masyarakat	Masyarakat			30 Persen	30 Persen	Rp 24,100,567,650	Rp 23,854,564,290	(246,003,360)	APBD	APBD
2	19	03	2.03	0006	Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	450 Orang	450 Orang	Rp 175,480,000	Rp 159,645,000	(15,835,000)	APBD	APBD
2	19	03	2.03	0008	Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science)	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Pelatda	2 Pelatda	Rp 3,419,693,650	Rp 3,212,231,290	(207,462,360)	APBD	APBD
2	19	03	2.03	0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150 Orang	150 Orang	Rp 20,505,394,000	Rp 20,482,688,000	(22,706,000)	APBD	APBD
2	19	03	2.05		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Penyelenggaraan, pengembangan dan pemasalan, festival dan olahraga rekreasi	Penyelenggaraan, pengembangan dan pemasalan, festival dan olahraga rekreasi	Masyarakat	Masyarakat			33 Persen	33 Persen	Rp 3,508,696,870	Rp 3,427,728,380	(80,968,490)	APBD	APBD

2	19	03	2.05	0008	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 306,499,680	Rp 292,135,560	(14,364,120)	APBD	APBD
2	19	03	2.05	0010	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Lembaga	1 Lembaga	Rp 3,202,197,190	Rp 3,135,592,820	(66,604,370)	APBD	APBD
2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN									Rp 1,809,999,420	Rp 1,609,556,560	(200,442,860)	APBD	APBD
2	22	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase pemenuhan Pengembangan Kebudayaan	Persentase pemenuhan Pengembangan Kebudayaan					33 Persen	33 Persen	Rp 1,809,999,420	Rp 1,609,556,560	(200,442,860)	APBD	APBD
2	22	02	2.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Presentasi pelaksanaan pelindungan, pengembangan, pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan	Presentasi pelaksanaan pelindungan, pengembangan, pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan	Masyarakat	Masyarakat			33 Persen	33 Persen	Rp 1,809,999,420	Rp 1,609,556,560	(200,442,860)	APBD	APBD
2	22	02	2.01	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Objek	12 Objek	Rp 1,051,499,550	Rp 949,089,290	(102,410,260)	APBD	APBD
2	22	02	2.01	0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150 Orang	150 Orang	Rp 758,499,870	Rp 660,467,270	(98,032,600)	APBD	APBD
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									Rp 3,502,594,060	Rp 3,183,895,100	(318,698,960)	APBD	APBD

3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA									Rp 3,502,594,060	Rp 3,183,895,100	(318,698,960)	APBD	APBD
3	26	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase pemenuhan Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase pemenuhan Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata					33 Persen	33 Persen	Rp 408,490,000	Rp 348,070,500	(60,419,500)	APBD	APBD
3	26	02	2.01		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten / Kota	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten / Kota	Masyarakat	Masyarakat			33 Persen	33 Persen	Rp 408,490,000	Rp 348,070,500	(60,419,500)	APBD	APBD
3	26	02	2.01	0005	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Lokasi	3 Lokasi	Rp 275,490,000	Rp 275,490,000	-	APBD	APBD
3	26	02	2.01	0007	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20 Laporan	20 Laporan	Rp 133,000,000	Rp 72,580,500	(60,419,500)	APBD	APBD
3	26	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Prosentase Pemenuhan Promosi Pariwisata	Prosentase Pemenuhan Promosi Pariwisata					33 Persen	33 Persen	Rp 908,297,140	Rp 866,002,100	(42,295,040)	APBD	APBD
3	26	03	2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media	Masyarakat	Masyarakat			32 Persen	32 Persen	Rp 908,297,140	Rp 866,002,100	(42,295,040)	APBD	APBD
3	26	03	2.01	0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Kegiatan	4 Kegiatan	Rp 668,195,140	Rp 657,677,000	(10,518,140)	APBD	APBD
3	26	03	2.01	0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik,	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Tangerang, Semua	Kab. Tangerang,	5 Promosi	5 Promosi	Rp 240,102,000	Rp 208,325,100	(31,776,900)	APBD	APBD

					dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri			Kecamatan, Semua Kel/Desa	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa							
3	26	05			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif					33 Persen	33 Persen	Rp 2,185,806,920	Rp 1,969,822,500	(215,984,420)	APBD	APBD
3	26	05	2.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Peningkatan kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Peningkatan kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Masyarakat	Masyarakat			33 Persen	33 Persen	Rp 2,185,806,920	Rp 1,969,822,500	(215,984,420)	APBD	APBD
3	26	05	2.01	0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20 Orang	20 Orang	Rp 177,586,050	Rp 144,575,160	(33,010,890)	APBD	APBD
3	26	05	2.01	0009	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30 Orang	30 Orang	Rp 2,008,220,870	Rp 1,825,247,340	(182,973,530)	APBD	APBD

Tabel 4.3
Rencana Kerja dan Pendanaan Perubahan DISPORABUDPAR
Kabupaten Tangerang Tahun 2025 (Setelah Perubahan - APBDP)

NO	Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2025 (Tahun berjalan)				
									Pagu Indikatif			Sumber Dana	
							Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan (APBD Murni)	Sesudah Perubahan (APBD Perubahan)	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1	2					3	4	5	13	14	15 = (14-13)	16	17
						Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata			Rp 53.519.492.958	Rp 53.647.520.663	128.027.705	APBD	APBD
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			Rp 50.016.898.898	Rp 51.289.762.463	1.272.863.565	APBD	APBD
	2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			Rp 48.206.899.478	Rp 49.240.205.903	1.033.306.425	APBD	APBD
1	2	19	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	Rp 13.141.298.238	Rp 12.053.485.893	(1.087.812.345)	APBD	APBD
	2	19	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen perencanaan dan Pelaporan	Persentase Ketersediaan Dokumen perencanaan dan Pelaporan	Rp 114.251.800	Rp 85.187.560	(29.064.240)	APBD	APBD
	2	19	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 60.895.000	Rp 45.670.190	(15.224.810)	APBD	APBD
	2	19	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 26.926.800	Rp 20.194.940	(6.731.860)	APBD	APBD
	2	19	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 26.430.000	Rp 19.322.430	(7.107.570)	APBD	APBD
	2	19	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 10.265.899.834	Rp 9.790.100.899	(475.798.935)	APBD	APBD
	2	19	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 10.253.935.834	Rp 9.781.127.899	(472.807.935)	APBD	APBD
	2	19	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Rp 11.964.000	Rp 8.973.000	(2.991.000)	APBD	APBD
	2	19	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp 14.999.700	Rp 11.249.580	(3.750.120)	APBD	APBD
	2	19	01	2.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan	Rp 14.999.700	Rp 11.249.580	(3.750.120)	APBD	APBD

							Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD					
	2	1 9	0 1	2.0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 45.390.000	Rp 47.338.000	1.948.000	APBD	APBD
	2	1 9	0 1	2.0 5	000 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Rp 45.390.000	Rp 47.338.000	1.948.000	APBD	APBD
	2	1 9	0 1	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 1.978.935.700	Rp 1.455.017.914	(523.917.786)	APBD	APBD
	2	1 9	0 1	2.0 6	000 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Rp 391.771.800	Rp 493.156.564	101.384.764	APBD	APBD
	2	1 9	0 1	2.0 6	000 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Rp 149.790.700	Rp 149.790.700	-	APBD	APBD
	2	1 9	0 1	2.0 6	000 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Rp 100.086.200	Rp 90.909.650	(9.176.550)	APBD	APBD
	2	1 9	0 1	2.0 6	000 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Rp 137.500.000	Rp 137.500.000	-	APBD	APBD
	2	1 9	0 1	2.0 6	000 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp 150.000.000	Rp 113.550.000	(36.450.000)	APBD	APBD
	2	1 9	0 1	2.0 6	000 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 1.049.787.000	Rp 470.111.000	(579.676.000)	APBD	APBD
	2	1 9	0 1	2.0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 180.408.704	Rp 123.179.440	(57.229.264)	APBD	APBD
	2	1 9	0 1	2.0 8	000 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 14.936.000	Rp 11.202.000	(3.734.000)	APBD	APBD
	2	1 9	0 1	2.0 8	000 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Rp 165.472.704	Rp 111.977.440	(53.495.264)	APBD	APBD
	2	1 9	0 1	2.0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Rp 541.412.500	Rp 541.412.500	-	APBD	APBD
	2	1 9	0 1	2.0 9	000 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Rp 462.032.500	Rp 462.032.500	-	APBD	APBD
	2	1 9	0 1	2.0 9	000 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Rp 55.800.000	Rp 55.800.000	-	APBD	APBD
	2	1 9	0 1	2.0 9	001 1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Rp 23.580.000	Rp 23.580.000	-	APBD	APBD

2	2	1 9	0 2			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase pemenuhan Pengembangan Kapasitas Daya saing Kepemudaan	Persentase pemenuhan Pengembangan Kapasitas Daya saing Kepemudaan	Rp 6.596.887.660	Rp 6.620.650.800	23.763.140	APBD	APBD
	2	1 9	0 2	2.0 1		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Presentasi Pemenuhan Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda	Presentasi Pemenuhan Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda	Rp 1.725.043.710	Rp 1.498.075.160	(226.968.550)	APBD	APBD
	2	1 9	0 2	2.0 1	001 3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota	Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Rp 349.777.610	Rp 292.995.610	(56.782.000)	APBD	APBD
	2	1 9	0 2	2.0 1	001 4	Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota	Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi	Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi	Rp 892.266.310	Rp 773.521.990	(118.744.320)	APBD	APBD
	2	1 9	0 2	2.0 1	001 5	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	Rp 482.999.790	Rp 431.557.560	(51.442.230)	APBD	APBD
	2	1 9	0 2	2.0 2		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Pemenuhan Pemberdayaan dan Pengembangan pemuda	Presentase Pemenuhan Pemberdayaan dan Pengembangan pemuda	Rp 4.871.843.950	Rp 5.122.575.640	250.731.690	APBD	APBD
	2	1 9	0 2	2.0 2	000 3	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	Rp 3.515.000.000	Rp 3.695.000.000	180.000.000	APBD	APBD
	2	1 9	0 2	2.0 2	000 4	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Rp 1.356.843.950	Rp 1.427.575.640	70.731.690	APBD	APBD
3	2	1 9	0 3			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase pemenuhan Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase pemenuhan Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Rp 28.468.713.580	Rp 30.566.069.210	2.097.355.630	APBD	APBD
	2	1 9	0 3	2.0 2		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaraannya kejuaraan multi even dan single event tingkat Kab/kota	Terselenggaraannya kejuaraan multi even dan single event tingkat Kab/kota	Rp 859.449.060	Rp 818.776.840	(40.672.220)	APBD	APBD
	2	1 9	0 3	2.0 2	000 4	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Rp 859.449.060	Rp 818.776.840	(40.672.220)	APBD	APBD
	2	1 9	0 3	2.0 3		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Terlaksanaannya seleksi atlet daerah	Terlaksanaannya seleksi atlet daerah	Rp 24.100.567.650	Rp 26.319.563.990	2.218.996.340	APBD	APBD
	2	1 9	0 3	2.0 3	000 6	Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	Rp 175.480.000	Rp 159.645.000	(15.835.000)	APBD	APBD
	2	1 9	0 3	2.0 3	000 8	Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science)	Rp 3.419.693.650	Rp 5.212.230.990	1.792.537.340	APBD	APBD

	2	19	03	2.03	0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	Rp 20.505.394.000	Rp 20.947.688.000	442.294.000	APBD	APBD
	2	19	03	2.05		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Penyelenggaraan, pengembangan dan pemasalan, festival dan olahraga rekreasi	Penyelenggaraan, pengembangan dan pemasalan, festival dan olahraga rekreasi	Rp 3.508.696.870	Rp 3.427.728.380	(80.968.490)	APBD	APBD
	2	19	03	2.05	0008	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat	Rp 306.499.680	Rp 292.135.560	(14.364.120)	APBD	APBD
	2	19	03	2.05	0010	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Rp 3.202.197.190	Rp 3.135.592.820	(66.604.370)	APBD	APBD
	2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			Rp 1.809.999.420	Rp 2.049.556.560	239.557.140	APBD	APBD
4	2	22	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase pemenuhan Pengembangan Kebudayaan	Persentase pemenuhan Pengembangan Kebudayaan	Rp 1.809.999.420	Rp 2.049.556.560	239.557.140	APBD	APBD
	2	22	02	2.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Presentasi pelaksanaan pelindungan, pengembangan, pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan	Presentasi pelaksanaan pelindungan, pengembangan, pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan	Rp 1.809.999.420	Rp 2.049.556.560	239.557.140	APBD	APBD
	2	22	02	2.01	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	Rp 1.051.499.550	Rp 1.389.089.290	337.589.740	APBD	APBD
	2	22	02	2.01	0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Rp 758.499.870	Rp 660.467.270	(98.032.600)	APBD	APBD
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			Rp 3.502.594.060	Rp 2.357.758.200	(1.144.835.860)	APBD	APBD
	3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA			Rp 3.502.594.060	Rp 2.357.758.200	(1.144.835.860)	APBD	APBD
5	3	26	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase pemenuhan Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase pemenuhan Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Rp 408.490.000	Rp 348.070.500	(60.419.500)	APBD	APBD
	3	26	02	2.01		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten / Kota	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten / Kota	Rp 408.490.000	Rp 348.070.500	(60.419.500)	APBD	APBD
	3	26	02	2.01	0005	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Rp 275.490.000	Rp 275.490.000	-	APBD	APBD
	3	26	02	2.01	0007	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan	Rp 133.000.000	Rp 72.580.500	(60.419.500)	APBD	APBD

							evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota					
6	3	26	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Prosentase Pemenuhan Promosi Pariwisata	Prosentase Pemenuhan Promosi Pariwisata	Rp 908.297.140	Rp 865.999.100	(42.298.040)	APBD	APBD
	3	26	03	2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media	Rp 908.297.140	Rp 865.999.100	(42.298.040)	APBD	APBD
	3	26	03	2.01	0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Rp 668.195.140	Rp 657.677.000	(10.518.140)	APBD	APBD
	3	26	03	2.01	0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Rp 240.102.000	Rp 208.322.100	(31.779.900)	APBD	APBD
7	3	26	05			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Rp 2.185.806.920	Rp 1.143.688.600	(1.042.118.320)	APBD	APBD
	3	26	05	2.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Peningkatan kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Peningkatan kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Rp 2.185.806.920	Rp 1.143.688.600	(1.042.118.320)	APBD	APBD
	3	26	05	2.01	0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Rp 177.586.050	Rp 144.575.160	(33.010.890)	APBD	APBD
	3	26	05	2.01	0009	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	Rp 2.008.220.870	Rp 999.113.440	(1.009.107.430)	APBD	APBD

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaandan Pariwisata Tahun Anggaran 2025 merupakan salah satu tahapan awal dalam pelaksanaan Rencana Strategis Tahun 2024-2026, yang disusun secara sinergis dan berkesinambungan dengan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi organisasi dalam rangka mewujudkan visi dan misi.

Sebagai suatu dokumen perencanaan, rencana kerja ini merupakan pedoman bagi jajaran Dinas yang berada dalam lingkup Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tangerang dalam melaksanakan kegiatannya selama 1 (satu) tahun anggaran yaitu Tahun Anggaran 2025.

Dalam rangka mengoptimalkan hasil dari pelaksanaan kegiatan ini pada pencapaian kinerja yang diharapkan, maka setiap bagian dari dinas yang secara langsung bertanggung jawab terhadap kegiatan tersebut, dan berkewajiban untuk menuangkan kegiatan tersebut ke dalam bentuk dokumen teknis operasional kegiatan, yaitu Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja (RKA) maupun Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja (DPA).

Selain itu, pada saat kegiatan tersebut dilaksanakan setiap pengelola kegiatan maupun penanggung jawab kegiatan perlu melaksanakan pengendalian secara periodik yang dilaksanakan melalui monitoring dan evaluasi. Hal ini perlu dilakukan mengingat kegiatan monitoring merupakan suatu proses manajamen yang tidak terpisahkan dengan fungsi-fungsi lainnya seperti perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan sedangkan kegiatan evaluasi juga sangat bermanfaat sebagai umpan balik bagi perencanaan yang akan datang.

27. Dinas Perpustakaan dan Arsip

BAB I
PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang

Dokumen perencanaan pada setiap Perangkat Daerah (PD) merupakan dokumen yang sangat penting seperti Rencana Kerja (Renja). Hal ini telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah, maka setiap Organisasi Perangkat Daerah (PD) diwajibkan untuk menyusun Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah (Renja PD). Renja Perubahan PD merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Perencanaan Kerja merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah pada tahun n+1 dalam rangka pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan yang saat ini dijadikan sebagai salah satu instrumen pertanggungjawaban. Perencanaan kerja ini merupakan pengintegrasian antara sumber daya menusia dengan berbagai sumber daya lainnya yang dimiliki organisasi sehingga diharapkan mampu menjawab tuntutan dari visi dan misi yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang.

Sehubungan dengan hal itu, di bidang perencanaan setiap instansi pemerintah dituntut untuk menyiapkan dan menyusun rencana kinerja tahunan dengan mengacu pada Renstra. Hal tersebut akan menjadi tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pimpinan dan seluruh anggota satuan organisasi/unit kerja pada akhir tahun.

Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang: sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan; indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya; program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Selain itu dimuat pula keterangan yang antara lain menjelaskan keterkaitan kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi/sektor lain. Sasaran yang dimaksud pada rencana kinerja ini adalah sasaran sebagaimana dimuat dalam dokumen Renstra. Selanjutnya diidentifikasi sasaran mana yang akan diwujudkan pada tahun yang bersangkutan beserta indikator dan rencana tingkat capaiannya (targetnya).

Rencana Kerja Perubahan Dinas Perpustakaan dan Arsip Tahun 2025 akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan yang telah ditetapkan sebagai

Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Pembangunan Daerah bagi Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tangerang merupakan suatu penjabaran dari Visi dan Misi serta Program dari Perangkat Daerah dengan berpedoman pada RPJM Daerah, dan berisikan informasi mengenai sumberdaya yang diperlukan, keluaran dan manfaat. Keluaran dan Manfaat dalam Renja Perubahan ini merupakan indikator yang ingin dicapai namun tidaklah bersifat kaku, sehingga masih dapat diperbaiki dengan memperhatikan dinamika masyarakat dan RPJMD Pemerintah Kabupaten Tangerang.

1. 2. Landasan Hukum

Landasan penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Perpustakaan Dan Arsip Kabupaten Tangerang Tahun 2025 dalam rangka sinkronisasi dan konsistensi dengan dokumen perencanaan lainnya didasarkan pada:

1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);

8) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah ProDaerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Surat Edaran menteri Dalam Negeri Nomor 050/200/II/Bangda perihal Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah;
13) Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang;
14) Peraturan Bupati Tangerang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan Dan Arsip Kabupaten Tangerang.
15) Peraturan Bupati Tangerang Nomor 46 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026.

1. 3. Maksud dan Tujuan

A. MAKSUD

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Perpustakaan Dan Arsip Kabupaten Tangerang Tahun 2025 adalah untuk memberikan arah dan acuan bagi Aparatur dilingkungan Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tangerang dalam mengemban dan melaksanakan tugas serta tanggungjawab sesuai dengan tugas dan fungsinya serta penajaman penyampaian Renstra SKPD untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

B. TUJUAN

Tujuan dari disusunnya Rencana Kerja Perubahan ini juga untuk memberikan arah dan penyatuan pola pikir dan tindak dalam mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah dibidang perpustakaan dan arsip, juga sebagai tolok ukur bagi pencapaian Kinerja Organisasi pada Dinas Perpustakaan dan Arsip.

1. 4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Perubahan Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tangerang Tahun 2025 terdiri dari beberapa bab, yaitu :

BAB I Berisi tentang penjelasan latar belakang penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Perpustakaan Dan Arsip, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penulisan;

BAB II Merupakan evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II tahun 2025, berisi evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun 2025, analisis gambaran pelayanan perangkat daerah sampai dengan Triwulan II tahun 2025, analisis hasil pengendalian pelaksanaan renja perangkat daerah sampai dengan Triwulan II tahun 2025, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah;

BAB III Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah berisi Perubahan Indikator Kinerja Perangkat Daerah, Perubahan Indikator Kinerja Program, Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan Perubahan Renja Perangkat Daerah;

BAB IV Penutup.

BAB II
EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

2. 1. Evaluasi Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025

Evaluasi Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025 menguraikan tentang hasil evaluasi Renja tahun berjalan 2025, selain itu juga memperhatikan dokumen Renstra sebagai bahan acuan. Sedangkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah menguraikan pencapaian kinerja.

Analisis Capaian Kinerja Pelayanan pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tangerang mulai tahun 2025 didasarkan pada Renstra 2024-2026 dimana indikator program dan target renstra SKPD telah disesuaikan dengan (tupoksi) tugas pokok dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tangerang.

Kajian (reviuw) terhadap evaluasi hasil pengendalian pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan II tahun 2025, mengacu pada APBD tahun 2025. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelakasanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya secara fisik telah berjalan sesuai rencana, namun penyerapan anggaran masih relative rendah dibandingkan dengan target yang seharusnya dicapai.

Adapun rekapitulasi evaluasi terhadap hasil pelaksanaan renja Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tangerang sampai dengan triwulan II Tahun 2025 disajikan dalam tabel berikut:

Formulir E.81
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Dinas Perpustakaan dan Arsip
Kabupaten Tangerang Tahun 2025

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perpustakaan dan Arsip

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026 (Tahun Berjalan/Tahun Akhir)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)	
									I		II		III		IV							
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = (5) + (11)		(13) = (12)/(4) x 100%	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																					
2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**																					
2.23.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan**	**100 %**	**20.417.897.742**	**95, 49 %**	**17.670.212.810**		**19.729.593.704**		**5.129.235.814**		**9.833.036.011**						**19.108.337.593**		**9.833.036.011**		**49,08%**
2.23.01.2.01	**PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH**	**Persentase Ketersediaan Dokumen perencanaan dan Pelaporan**	**100 %**	**211.921.080**		**129.399.271**		**162.895.030**		**60.230.000**		**60.230.000**						**152.693.230**		**60.230.000**		**39,24%**
2.23.01.2.01.0001	Sub Keg. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dok	178.779.410		81.461.916		88.807.530		43.600.000		51.119.000						81.221.530		51.119.000		36,30%
2.23.01.2.01.0006	Sub Keg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan LaporanCapaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Lap	9.867.670		47.937.355		16.439.850		9.340.000		9.867.670						16.439.850		9.867.670		100,00%
2.23.01.2.01.0007	Sub Keg. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Lap	23.274.000		-		57.647.650		7.290.000		7.290.000						55.031.850		7.290.000		31,32%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026 (Tahun Berjalan/Tahun Akhir)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)	
									I		II		III		IV							
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**		**(5)**		**(6)**		**(7)**		**(8)**		**(9)**		**(10)**		**(11)**		**(12) = (5) + (11)**		**(13) = (12)/(4) x 100%**	
			K	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**
2.23.01.2.02	**ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100 %**	**15.882.290.690**		**13.357.538.179**		**14.359.222.708**		**4.305.446.989**		**8.000.478.349**						**14.051.865.969**		**8.000.478.349**		**49,46%**
2.23.01.2.02.0001	Sub Keg. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	77 Orang/ Bulan	15.859.790.730		13.332.538.240		14.333.362.808		4.302.526.989		7.997.558.349						14.026.006.069		7.997.558.349		49,51%
2.23.01.2.02.0005	Sub Keg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan AkhirTahun SKPD	4 Laporan	22.499.960		24.999.939		25.859.900		2.920.000		2.920.000						25.859.900		2.920.000		12,98%
2.23.01.2.05	**ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH**	**Persentase aparatur yang meningkat kapasitasnya**	**100 %**	**-**		**94.999.919**		**213.232.900**		**-**		**-**						**179.778.000**		**-**		**-**
2.23.01.2.05.0002	Sub Keg. Pengadaan Pakaian Dinas besertaAtribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		-		**-**		**34.314.500**		**-**		-						**33.268.000**		-		**-**
2.23.01.2.05.0009	Sub. Keg. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		-		94.999.919		178.918.400		-		-						146.510.000		-		-
2.23.01.2.06	**ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100 %**	**1.117.520.444**		**2.600.702.561**		**1.807.282.989**		**148.308.500**		**496.692.503**						**1.746.221.240**		**496.692.503**		**48,55%**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026 (Tahun Berjalan/Tahun Akhir)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)	
									I		II		III		IV							
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**		**(5)**		**(6)**		**(7)**		**(8)**		**(9)**		**(10)**		**(11)**		**(12) = (5) + (11)**		**(13) = (12)/(4) x 100%**	
			K	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**
2.23.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	39.959.900		54.926.932		54.864.500		-		38.514.000						40.980.500		38.514.000		96,38%
2.23.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 Paket	462.621.900		1.457.104.987		333.587.000		52.030.000		52.030.000						304.578.900		52.030.000		23,12%
2.23.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	71.615.179		-		120.321.239		-		69.980.550						116.933.900		69.980.550		97,72%
2.23.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	96.651.900		208.881.302		176.007.500		2.835.500		93.214.853						172.415.800		93.214.853		96,44%
2.23.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	26.700.400		65.883.940		78.090.850		-		25.758.000						75.699.570		25.758.000		94,67%
2.23.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dok	124.000.000		50.000.000		22.571.400		62.978.000		75.636.500						22.571.400		75.636.500		61,00%
2.23.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Lap	32.812.000		59.990.000		54.614.000		8.035.000		17.549.000						54.589.000		17.549.000		53,48%
2.23.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Lap	263.160.000		703.915.400		967.226.500		22.430.000		124.009.600						958.452.170		124.009.600		30,56%
2.23.01.2.07	**PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH**	**Persentase Pemenuhan pengadaan**	**100 %**	**-**		**-**		**20.732.400**		**-**		**-**						**20.000.000**		**-**		**-**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026 (Tahun Berjalan/Tahun Akhir)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)	
									I		II		III		IV							
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**		**(5)**		**(6)**		**(7)**		**(8)**		**(9)**		**(10)**		**(11)**		**(12) = (5) + (11)**		**(13) = (12)/(4) x 100%**	
			K	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**
	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAERAH	**barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah**																				
2.23.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		-		-		20.732.400		-		-						20.000.000		-		-
2.23.01.2.08	**PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Persentase pemenuhan Jasa Penunjang**	**100 %**	**1.808.135.568**		**330.655.660**		**1.927.725.660**		**472.137.000**		**815.976.500**						**1.749.397.845**		**815.976.500**		**49,27%**
2.23.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12Lap	10.800.000		19.953.660		19.953.660		2.700.000		4.500.000						13.205.845		4.500.000		41,67%
2.23.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Lap	1.797.335.568		310.702.000		1.907.772.000		469.437.000		811.476.500						1.736.192.000		811.476.500		49,32%
2.23.01.2.09	**PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	**100 %**	**1.398.029.960**		**1.156.917.220**		**1.238.502.017**		**143.113.325**		**451.611.989**						**1.208.381.309**		**451.611.989**		44,94%
2.23.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	219.209.556		81.150.720		238.676.368		25.688.329		61.908.827						229.750.219		61.908.827		28,24%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026 (Tahun Berjalan/Tahun Akhir)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)	
									I		II		III		IV							
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**		**(5)**		**(6)**		**(7)**		**(8)**		**(9)**		**(10)**		**(11)**		**(12) = (5) + (11)**		**(13) = (12)/(4) x 100%**	
			K	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**
2.23.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	23 Unit	480.890.404		544.306.500		523.585.649		89.674.996		169.528.162						505.480.090		169.528.162		35,25%
2.23.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	81 Unit	143.800.000		176.140.000		130.400.000		27.750.000		61.200.000						129.475.000		61.200.000		42,56%
2.23.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	554.130.000		355.320.000		345.840.000		-		158.975.000						343.676.000		158.975.000		98,66%
2.23.02	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	**Persentase pemenuhan pembinaan perpustakaan**	**100 %**	**1.512.936.910**		**4.060.257.129**		**3.394.820.530**		**72.758.000**		**344.508.000**						**3.301.451.730**		**344.508.000**		**27,16%**
2.23.02.2.01	**PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan pengelolaan perpustakaan tingkat daerah kabupaten/kota**	**100 %**	**868.623.410**		**1.787.137.282**		**1.527.062.390**		**20.908.000**		**153.768.000**						**1.494.027.090**		**153.768.000**		**22,01%**
2.23.02.2.01.0002	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan diWilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	5 Perpust	247.083.500		-		453.444.760		-		96.602.000						440.263.160		96.602.000		72,27%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026 (Tahun Berjalan/Tahun Akhir)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)	
									I		II		III		IV							
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**		**(5)**		**(6)**		**(7)**		**(8)**		**(9)**		**(10)**		**(11)**		**(12) = (5) + (11)**		**(13) = (12)/(4) x 100%**	
			K	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**
2.23.02.2.01.0012	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah layanan perpustakaan	6 Layanan	108.379.000		1.238.870.355		-		20.444.000		27.087.000						-		27.087.000		26,74%
2.23.02.2.01.0016	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	280 Org	163.332.010		-		598.758.530		-		-						592.429.330		-		-
2.23.02.2.01.0017	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	4 Dok	128.222.000		-		64.930.000		-		29.351.000						63.006.000		29.351.000		33,59%
2.23.02.2.01.0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan KeberagamanKoleksi Perpustakaan	1822 Eks	221.606.900		-		409.929.100		464.000		728.000						398.328.600		728.000		0,33%
2.23.02.2.01.0008	Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicetak dan Diadakan		-		548.266.927		-		-		-						-		-		-
2.23.02.2.02	**PEMBUDAYAAN GEMAR MEMBACA TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan pembudayaan gemar**	**100 %**	**644.313.500**		**2.273.119.847**		**1.867.758.140**		**51.850.000**		**190.740.000**						**1.807.424.640**		**190.740.000**		**33,48%**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026 (Tahun Berjalan/Tahun Akhir)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)	
									I		II		III		IV							
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**		**(5)**		**(6)**		**(7)**		**(8)**		**(9)**		**(10)**		**(11)**		**(12) = (5) + (11)**		**(13) = (12)/(4) x 100%**	
			K	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**
		membaca tingkat daerah kabupaten/kota																				
2.23.02.2.02.0006	Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Didukung Kegiatannya	29 Org	95.778.500		-		100.619.960		-		-						77.361.260		-		-
2.23.02.2.02.0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	12 Perpust	200.255.000		-		106.479.000		-		-						103.814.000		-		-
2.23.02.2.02.0009	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	12 Org	130.705.000		1.465.792.120		200.497.100		-		73.770.000						196.803.300		73.770.000		33,48%
2.23.02.2.02.0001	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	50 Lokus	217.575.000		807.327.727		305.562.080		51.850.000		116.970.000						282.421.080		116.970.000		81,82%
2.23.02.2.02.0002	Pembangunan danPemeliharaan SaranaPerpustakaan di Tempat-Tempat Umum yangMenjadi KewenanganDaerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan DaerahKabupaten/Kota		-		-		1.154.600.000										1.147.025.000				
2.24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**																					

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026 (Tahun Berjalan/Tahun Akhir)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)	
									I		II		III		IV							
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**		**(5)**		**(6)**		**(7)**		**(8)**		**(9)**		**(10)**		**(11)**		**(12) = (5) + (11)**		**(13) = (12)/(4) x 100%**	
			K	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**
2.24.02	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	**Persentase pemenuhan kegiatan pada program pengelolaan arsip**	**100 %**	**995.310.600**		**2.711.229.404**		**1.135.312.810**		**56.106.000**		**228.157.000**						**1.064.738.000**		**228.157.000**		**22,92%**
2.24.02.2.01	**PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan pengelolaan arsip dinamis daerah kabupaten/kota**	**100 %**	**114.639.000**		**699.877.516**		**661.714.700**		**8.606.000**		**8.606.000**						**618.641.200**		**8.606.000**		**7,48%**
2.24.02.2.01.0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	-	-		699.877.516		480.426.500		-		-						444.569.000		-		-
2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Lap	114.639.000		-		181.288.200		8.606.000		8.606.000						174.072.200		8.606.000		7,48%
2.24.02.2.02	**PENGELOLAAN ARSIP STATIS DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan pengelolaan arsip statis daerah kabupaten/kota**	**100 %**	**546.122.200**		**756.494.582**		**180.225.400**		**43.000.000**		**95.608.000**						**165.160.000**		**95.608.000**		**17,51%**
2.24.02.2.02.0002	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	10000 Arsip	546.122.200		756.494.582		180.225.400		43.000.000		95.608.000						165.160.000		95.608.000		17,51%
2.24.02.2.03	**PENGELOLAAN SIMPUL JARINGAN INFORMASI KEARSIPAN NASIONAL TINGKAT KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan pengelolaan simpul jaringan informasi kearsipan**	**100 %**	**334.549.400**		**1.254.857.306**		**293.372.710**		**4.500.000**		**123.943.000**						**280.936.800**		**123.943.000**		**37,09%**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026 (Tahun Berjalan/Tahun Akhir)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)	
									I		II		III		IV							
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**		**(5)**		**(6)**		**(7)**		**(8)**		**(9)**		**(10)**		**(11)**		**(12) = (5) + (11)**		**(13) = (12)/(4) x 100%**	
			K	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**
		nasional tingkat kabupaten/kota																				
2.24.02.2.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	63 Pengguna	141.684.400		956.323.038		136.298.700		4.500.000		7.079.000						131.063.600		7.079.000		4,97%
2.24.02.2.03.0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	1 Lap	192.865.000		298.534.268		157.074.010		-		116.864.000						149.873.200		116.864.000		60,95%
2.24.03	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**	**Persentase pemenuhan kegiatan pada program perlindungan dan penyelamatan arsip**	**100 %**	**414.579.050**		**-**		**656.481.480**		**6.424.000**		**70.655.600**						**622.463.680**		**70.655.600**		**38,29%**
2.24.03.2.01	**PEMUSNAHAN ARSIP DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA YANG MEMILIKI RETENSI DI BAWAH 10 (SEPULUH) TAHUN**	**Persentase pemenuhan pemusnahan arsip dilingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota yang memiliki retensi dibawah 10 tahun**	**100 %**	**-**		**-**		**358.280.400**		**-**		**-**						**355.475.600**		**-**		**-**
2.24.03.2.01.0001	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan		-		-		195.145.800		-		-						194.075.800		-		-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026 (Tahun Berjalan/Tahun Akhir)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)	
									I		II		III		IV							
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**		**(5)**		**(6)**		**(7)**		**(8)**		**(9)**		**(10)**		**(11)**		**(12) = (5) + (11)**		**(13) = (12)/(4) x 100%**	
			K	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**
		Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi diBawah 10 (Sepuluh) Tahun																				
2.24.03.2.01.0002	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan		-		-		163.134.600		-		-						161.399.800		-		-
2.24.03.2.02	**PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP AKIBAT BENCANA YANG BERSKALA KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota**	**100 %**	**-**		**-**		**298.201.080**		**46.950.000**		**-**						**266.988.080**		**-**		**-**
2.24.03.2.02.0001	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana		-		-		298.201.080		46.950.000		-						266.988.080		-		-
2.24.03.2.04	**AUTENTIKASI ARSIP STATIS DAN ARSIP HASIL ALIH MEDIA KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media kabupaten/kota**	**100 %**	**141.480.360**		**-**		**-**		**4.380.000**		**66.567.600**						**-**		**66.567.600**		**47,05%**
2.24.03.2.04.0001	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai danDitetapkan	2 Arsip	69.306.800		-		-		2.190.000		62.187.600						-		62.187.600		89,73%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026 (Tahun Berjalan/Tahun Akhir)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)	
									I		II		III		IV							
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**		**(5)**		**(6)**		**(7)**		**(8)**		**(9)**		**(10)**		**(11)**		**(12) = (5) + (11)**		**(13) = (12)/(4) x 100%**	
			K	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**
2.24.03.2.04.0002	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai PersyaratanPenjaminan Keabsahan Arsip	2 Arsip	72.173.560		-		-		2.190.000		4.380.000						-		4.380.000		6,07%
2.24.03.2.05	**PENCARIAN ARSIP STATIS KABUPATEN/KOTA YANG DINYATAKAN HILANG**	**Persentase pemenuhan pencarian arsip statis kabupaten/kota yang dinyatakan hilang**	**100 %**	**273.098.690**		**-**		**-**		**2.044.000**		**4.088.000**						**-**		**4.088.000**		**9,50%**
2.24.03.2.05.0001	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang yang Dinilai dan Ditetapkan	2 Arsip	273.098.690		-		-		2.044.000		4.088.000						-		4.088.000		9,50%
	JUMLAH TOTAL			**23.340.724.302**		**24.441.699.343**		**24.916.208.524**		**5.264.523.814**		**10.476.356.611**						**24.096.991.003**		**10.476.356.611**		**46,60%**

Pencapaian hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Renstra Perangkat Daerah tidak terlepas dari adanya faktor pendorong yaitu adanya sistem informasi yang saling terintegrasi. Adanya SIPD membantu kerja bidang-bidang di Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tangerang dalam pelaksanaan pengendalian dan perencanaan program kegiatan Perangkat Daerah yang diampu.

2. 2. Analisis Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II

Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tangerang berdasarkan indikator kinerja yang merupakan sasaran pembangunan daerah tahun 2025 merupakan suatu kesatuan dalam pencapaian pembangunan yang tercantum pada Renstra tahun 2024-2026 untuk indikator kinerja tujuan Kabupaten Tangerang Tahun 2025 pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tangerang adalah sebagai berikut:

Indikator Tujuan	Satuan	Target Renstra	Target Renja
Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai Indeks	87,75	87,75
Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	73,15	73,15

Indikator kinerja utama Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tangerang Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Indikator kinerja sasaran	Satuan	Target Renstra	Target Renja
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai Indeks	79,71	79,71
Indeks Pengelolaan dan Pengawasan Kearsipan	Nilai Indeks	81,75	81,75
Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai Indeks	88,00	88,00
Nilai AKIP	Nilai	76,20	76,20

Pada perubahan Renja Tahun 2025, nomenklatur program pada OPD merupakan hasil pemetaan program berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Selanjutnya Indikator Kinerja Program disesuaikan berdasarkan hasil pemetaan tersebut dan tidak terdapat perubahan target kinerja, sebagaimana berikut:

No	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Renstra	Target Renja
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	%	100	100
2	Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase pemenuhan pembinaan perpustakaan	%	100	100

3	Program Pengelolaan Arsip	Persentase pemenuhan kegiatan pada program pengelolaan arsip	%	100	100
4	Program Penyelamatan Arsip	Persentase pemenuhan kegiatan pada program perlindungan dan penyelamatan arsip	%	100	100

2. 3.Analisis hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2025.

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah, dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pencapaian sasaran strategis Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tangerang dicerminkan dalam capaian Indikator Kinerja sasaran. Adapun evaluasi dan analisis secara rinci Indikator kinerja sasaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tangerang, diuraikan sebagai berikut :

Tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah, yang disesuaikan menurut Perangkat Daerah dengan format Tabel T-C.30 sebagai berikut:

Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tangerang

No	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Indeks kepuasan perpustakaan		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Perpustakaan	87	88,5			87	88,5			
			Jumlah pengunjung layanan perpustakan	87%	100%			87%	100%			
2	Indeks kepuasan kearsipan		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kearsipan	87	88,5			87	88,5			
			Jumlah SKPD menerapkan arsip baku sesuai NSPK jumlah OPD	16%	12,6%			16%	12,6%			
3	Nilai AKIP		Nilai AKIP	70,58	71	73,15	76,20	70,58	71	78,40	76,20	
4	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat			79,69	79,71			52.70	79,71	
5	Indeks Pengelolaan dan Pengawasan Kearsipan		Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan			81,65	81,75			80.26	81,75	
6	Indeks Kepuasan Masyarakat		Tingkat Keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat			87,75	88,00			88.75	88,00	

2. 4.Isu-isu Penting PenyelenggaraanTugas Dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu-isu yang berkembang berkenaan penyelenggaranaan Tugas dan Fungsi Dinas Perpustakaan Dan Arsip Kabupaten Tangerang sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam pembinaan urusan Perpustakaan dan Kearsipan adalah sebagai berikut:

a. Isu Internal

1) Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas

Salah satu modal utama pengembangan Perpustakaan dan Kearsipan adalah sumber daya manusia yang berkualitas dalam arti SDM yang sehat, mandiri, tangguh, handal, kreatif, professional dan memiliki kompetensi, pengetahuan, keterampilan, peran sosial, citra diri, perilaku, motivasi sesuai dengan jenis pekerjaannya dan berwawasan kebangsaan serta memiliki semangat melalui suatu sistem pelatihan/bimbingan teknis baik formal maupun informal di bidang perpustakaan dan kearsipan yang terencana. Untuk mampu memiliki kompetensi agar lebih berorientasi pada peningkatan kualitas SDM serta peningkatan jumlah pejabat fungsional perpustakaan dan kearsipan dari unsur-unsur yang terkandung dalam kompetensi fungsional pengetahuan merupakan langkah pertama yang harus diberikan kepada semua pihak yang terlibat dan peningkatan dalam penyelenggaraan perpustakaan dan kearsipan.

2) Koordinasi Antar Instansi Belum Bersinergis

Pengembangan Kearsipan dan perpustakaan dalam konteksnya merupakan bidang pengembangan yang sangat komplek dan memiliki banyak keterkaitan dengan pihak lainya, baik yang terkait secara langsung ataupun tidak langsung.Hubungan kelembagaan dalam wujud kordinasi antara pelaku kearsipan dan perpustakaan di rasakan belum optimal sehingga upaya meningkatkan koordinasi penyelenggaraan perpustakaan dan kearsipan perlu dilakukan melalui program-program terpadu dan terintergrasi seperti halnya program layanan perpustakaan keliling guna meningkatkan budaya baca masyarakat serta program pelatihan pengelolaan kearsipan guna efektivitas dalam pengelolaan arsip OPD sehingga pihak terkait baik instansi pemerintah, swasta dan masyarakat akan berpartisipasi aktif dalam rangka pencapaian sasaran peningkatan fungsi perpustakaan dan efektivitas dalam pengelolaan kearsipan.

3) Keterbatasan Sarana dan Prasarana Perpustakaan

Upaya untuk meningkatkan minat baca masyarakat pada saat ini dihadapkan pada suatu dilema bahwa di satu sisi lembaga diharapkan mampu berperan dalam meningkatkan minat baca masyarakat Kabupaten Tangerang, namun disisi lain sebagai pusat pelayanan baca masyarakat tidak diimbangi dengan sarana dan prasarana yang memadai baik untuk sarana baca maupun peralatan kantor di gedung kantor pusat maupun gedung kantor menetap yang ada di wilayah.

4) Belum optimalnya Pembinaan Perpustakaan

Pendampingan arsip di OPD belum optimal disebabkan seringnya pergantian pengelola arsip dan terbatasnya SDM di

Dinas Perpustakaan dan Arsip yang memiliki kompetensi di bidang kearsipan (belum adanya arsiparis) dan terbatasnya pustakawan dan kurangnya sumber daya manusia untuk pelayanan perpustakaan keliling dan menetap.

5) Penyusutan dan Pemusnahan Arsip Belum Optimal

Penyusutan dan pemusnahan arsip yang ada belum berdasarkan Jadwal Retensi Arsip (JRA), serta Penyusutan/penghapusan buku diatas 5 Tahun (yang sudah rusak) belum dilaksanakan secara optimal.

b. Isu Eksternal

1) Rendahnya Minat Baca Masyarakat

Rendahnya minat baca masyarakat disebabkan oleh fasilitas perpustakaan yang kurang memadai, koleksi buku yang kurang lengkap, rendahnya koordinasi dengan pihak luar dalam menentukan lokasi pelayanan perpustakaan keliling. Disamping itu pada masa sekarang ini perkembangan teknologi memudahkan dalam mencari koleksi Pustaka melalui website, sehingga masyarakat lebih banyak menggunakan kecanggihan tekonologi informasi sekarang ini.

2) Pengembangan Sistem Teknologi Informasi Perpustakaan dan Kearsipan Belum Optimal

Pengembangan Perpustakaan dan kearsipan membutuhkan berbagai acuan, khususnya yang terkait dengan prospek dan kelayakannya. Penyusunan berbagai acuan tersebut perlu didukung dengan system teknologi informasi serta data-data yang valid dan akurat. Keberadaan database kearsipan/perpustakaan sangat bermanfaat untuk memudahkan OPD dan masyarakat dalam memperoleh informasi arsip dan koleksi buku yang dibutuhkan akan tetapi sampai saat ini database tersebut masih dikelola oleh internal lembaga sehingga belum bisa di akses oleh khalayak umum, sehingga beberapa informasi yang dibutuhkan oleh instansi ataupun masyarakat belum bisa ditemukan dengan mudah dan cepat. Hal tersebut disebabkan karena terbatasnya anggaran untuk pengadaan server serta fasilitas pendukung sistem informasi perpustakaan dan kearsipan dan scanner A3 untuk alihmedia buku, penyerahan arsip dari OPD belum sepenuhnya bisa dilaksanakan dan belum ditetapkannya status arsip terbuka, tertutup, dikecualikan oleh Kepala OPD sebagai pencipta arsip.

3) Rendahnya Pemahaman Peraturan Perundang-undangan Perpustakaan dan Kearsipan

Rendahnya pemahaman tentang pengelolaan perpustakaan dan kearsipan mengakibatkan banyak arsip-arsip tercecer, hilang dan tidak terpelihara dengan baik. Oleh karena itu para pencipta arsip di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang di pandang perlu memahami tata kelola Arsip sesuai peraturan perundang-undangan serta kaidah kearsipan yang telah ditetapkan salah satunya adalah dengan mengikuti Bimbingan Teknis, Pelatihan yang diselengarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tangerang setiap tahun.

4) Rendahnya Kesadaran Aparatur Dalam Pengelolaan Arsip dan Perpustakaan

Salah satu kunci untuk tumbuh demi berkembangnya Pengelolaan Perpustakaan dan Kearsipan adalah terciptanya tata kelola perpustakaan dan arsip yang handal di seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang dan masyarakat. Lembaga Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tangerang telah mengadakan / melaksanakan penyelenggaraan pendampingan kearsipan bagi seluruh OPD dan pembinaan bagi perpustakaan masyarakat dan perpustakaan sekolah. Hal tersebut dilakukan untuk menumbuh kembangkan kesadaran setiap aparatur akan pentingnya pengelolaan perpustakaan dan arsip.

Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun 2025:

1. Peningkatan Pengawasan Perpustakaan dan Kearsipan dilapangan sebagai langkah awal pencegahan.
2. Peningkatan mutu pelayanan yang berbasis Online pasca pandemi Covid-19.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP TAHUN 2025

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satau atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perpustakan Dan Arsip Kabupaten Tangerang. Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakan Dan Arsip Kabupaten Tangerang sebagai instrumen sarah kebijakan untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) periode 2024-2026 dengan menghasilkan keluaran *(output)* dalam rangka mencapai hasil *(outcome)* suatu program.

Rencana Kerja Perubahan Dinas Perpustakaan Dan Arsip Kabupaten Tangerang Tahun 2025 berisi program dan kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih serta mewujudkan pembangunan jangka menengah maupun untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan kewenangan Dinas Perpustakaan Dan Arsip Kabupaten Tangerang.

Rencana Kerja Perubahan Dinas Perpustakaan Dan Arsip Kabupaten Tangerang Tahun 2025 dan pendanaan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel T-C.33.
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Kabupaten Tangerang

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perpustakaan dan Arsip

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**23.340.724.302**				**24.721.846.276**
2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**				**21.930.834.652**				**22.985.408.276**
2.23.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan**		**100%**	**20.417.897.742**			**100%**	**20.431.297.703**
2.23.01.2.01	**PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH**	**Persentase Ketersediaan Dokumen perencanaan dan Pelaporan**		**100%**	**211.921.080**			**100%**	**101.000.000**
2.23.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung	8 Dokumen	178.779.410	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		5 Dokumen	30.000.000
2.23.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		-	-			1 Dokumen	6.000.000
2.23.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		-	-			1 Dokumen	6.000.000
2.23.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		-	-			1 Dokumen	8.000.000
2.23.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		-	-			1 Dokumen	8.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.23.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung	1 Laporan	9.867.670	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Laporan	13.000.000
2.23.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung	6 Laporan	23.274.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		5 Laporan	30.000.000
2.23.01.2.02	**ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**100%**	**15.882.290.690**			**100%**	**16.118.297.703**
2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung	77 Orang/bulan	15.859.790.730	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		72 Orang	16.046.297.703
2.23.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung	1 Laporan	22.499.960	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2 Laporan	35.000.000
2.23.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		-	-			4 Laporan	25.000.000
2.23.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		-	-			1 Dokumen	12.000.000
2.23.01.2.05	**ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH**	**Persentase aparatur yang meningkat kapasitasnya**		**-**	**-**			**100%**	**205.000.000**
2.23.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung	-	-			1 Paket	80.000.000
2.23.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatih	Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung	-	-			140 Orang	125.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.23.01.2.06	**ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**100%**	**1.117.520.444**			**100%**	**690.000.000**
2.23.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung	1 Paket	39.959.900	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Paket	40.000.000
2.23.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung	9 Paket	462.621.900	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		7 Paket	125.000.000
2.23.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung	2 Paket	71.615.179	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2 Paket	70.000.000
2.23.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung	5 Paket	96.651.900	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		5 Paket	80.000.000
2.23.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung	1 Paket	26.700.400	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Paket	35.000.000
2.23.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung	2 Dokumen	124.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2 Dokumen	50.000.000
2.23.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung	2 Laporan	32.812.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2 Laporan	40.000.000
2.23.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung	11 Laporan	263.160.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		11 Laporan	250.000.000
2.23.01.2.07	**PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**	**Persentase Pemenuhan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah**		**-**	**-**			**100%**	**25.000.000**
2.23.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung	-	-			15 Unit	25.000.000
2.23.01.2.08	**PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Persentase pemenuhan Jasa Penunjang**		**100%**	**1.808.135.568**			**100%**	**1.417.000.000**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.23.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung	12 Laporan	10.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12 Laporan	11.000.000
2.23.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung	12 Laporan	1.797.335.568	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12 Laporan	1.406.000.000
2.23.01.2.09	**PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah**		**100%**	**1.398.029.960**			**100%**	**1.875.000.000**
2.23.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung	6 Unit	219.209.556	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		6 Unit	200.000.000
2.23.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung	23 Unit	480.890.404	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		23 Unit	400.000.000
2.23.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung	81 Unit	143.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		81 Unit	125.000.000
2.23.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung	1 Unit	554.130.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Unit	1.150.000.000
2.23.02	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	**Persentase pemenuhan pembinaan perpustakaan**		**100%**	**1.512.936.910**			**100%**	**2.355.000.000**
2.23.02.2.01	**PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan pengelolaan perpustakaan tingkat daerah kabupaten/kota**		**100%**	**868.623.410**			**100%**	**1.875.000.000**
2.23.02.2.01.0011	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung	5 Perpustakaan	247.083.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		5 Perpustakaan	1.100.000.000
2.23.02.2.01.0012	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Perpustakaan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi	Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung	6 Layanan	108.379.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		6 Layanan	150.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.23.02.2.01.0014	Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat	Jumlah koleksi perpustakaan (cetak/digital) yang dimanfaatkan oleh masyarakat						500 Eksemplar	150.000.000
2.23.02.2.01.0016	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung	280 Orang	163.332.010	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100 Orang	200.000.000
2.23.02.2.01.0017	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung	4 Dokumen	128.222.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		5 Dokumen	75.000.000
2.23.02.2.01.0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung	1822 Eksemplar	221.606.900	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2000 Eksemplar	125.000.000
2.23.02.2.01.0019	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan		-	-			15 Eksemplar	75.000.000
2.23.02.2.02	**PEMBUDAYAAN GEMAR MEMBACA TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan pembudayaan gemar membaca tingkat daerah kabupaten/kota**		**100%**	**644.313.500**			**100%**	**480.000.000**
2.23.02.2.02.0006	Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Didukung Kegiatannya	Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung	29 Orang	95.778.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		332 Orang	75.000.000
2.23.02.2.02.0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung	12 Perpustakaan	200.255.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		13 Perpustakaan	100.000.000
2.23.02.2.02.0008	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung	-	-			31 Perpustakaan	80.000.000
2.23.02.2.02.0009	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung	12 Orang	130.705.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		17 Orang	100.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.23.02.2.02.0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyaraka	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung	50 Lokus	217.575.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		75 Lokus	125.000.000
2.24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**				**1.409.889.650**				**1.527.523.800**
2.24.02	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	**Persentase pemenuhan kegiatan pada program pengelolaan arsip**		**100%**	**995.310.600**			**100%**	**435.000.000**
2.24.02.2.01	**PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan pengelolaan arsip dinamis daerah kabupaten/kota**		**100%**	**114.639.000**			**100%**	**80.000.000**
2.24.02.2.01.0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung	-	-				-
2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung	1 Laporan	114.639.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		34 Laporan	80.000.000
2.24.02.2.02	**PENGELOLAAN ARSIP STATIS DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan pengelolaan arsip statis daerah kabupaten/kota**		**100%**	**546.122.200**			**100%**	**125.000.000**
2.24.02.2.02.0002	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung	10000 Arsip	546.122.200	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1000 Arsip	125.000.000
2.24.02.2.03	**PENGELOLAAN SIMPUL JARINGAN INFORMASI KEARSIPAN NASIONAL TINGKAT KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan pengelolaan simpul jaringan informasi kearsipan nasional tingkat kabupaten/kota**		**100%**	**334.549.400**			**100%**	**230.000.000**
2.24.02.2.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung	63 Pengguna	141.684.400	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		10 Pengguna	80.000.000
2.24.02.2.03.0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung	1 Laporan	192.865.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Laporan	150.000.000
2.24.03	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**	**Persentase pemenuhan kegiatan pada program perlindungan dan penyelamatan arsip**		**100%**	**414.579.050**			**100%**	**20.200.000.000**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.24.03.2.01	**PEMUSNAHAN ARSIP DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA YANG MEMILIKI RETENSI DI BAWAH 10 (SEPULUH) TAHUN**	**Persentase pemenuhan pemusnahan arsip dilingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota yang memiliki retensi di bawah 10 tahun**		-	-			**100%**	**200.000.000**
2.24.03.2.01.0003	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung	-	-			250 Berkas	100.000.000
2.24.03.2.01.0004	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung	-	-			250 Berkas	100.000.000
2.24.03.2.02	**PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP AKIBAT BENCANA YANG BERSKALA KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota**		-	-			-	-
2.24.03.2.02.0001	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung	-	-			-	-
2.24.03.2.04	**AUTENTIKASI ARSIP STATIS DAN ARSIP HASIL ALIH MEDIA KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media kabupaten/kota**		**100%**	**141.480.360**			-	-
2.24.03.2.04.0001	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan	Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung	2 Arsip	69.306.800	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		-	-
2.24.03.2.04.0002	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung	2 Arsip	72.173.560	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		-	-
2.24.03.2.05	**PENCARIAN ARSIP STATIS KABUPATEN/KOTA YANG DINYATAKAN HILANG**	**Persentase pemenuhan pencarian arsip statis kabupaten/kota yang dinyatakan hilang**		**100%**	**273.098.690**			**100%**	**20.000.000.000**
2.24.03.2.05.0003	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman	Kab. Tangerang, Tigaraksa, Kadu Agung	2 Arsip	273.098.690	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Arsip	20.000.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	Jumlah Total				**23.340.724.302**				**43.421.297.703**

BAB IV
PENUTUP

Penetapan Rencana Kerja Perubahan Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tangerang Tahun 2025 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tangerang yang telah di sinkronkan dengan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026.

Keberhasilan Program dan Kegiatan yang ada di Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tangerang dalam mencapai target visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan sangat tergantung pada komitmen pimpinan dan segenap staf Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tangerang.

Demikian Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tangerang Tahun 2025, semoga dapat digunakan sebagai pedoman perencanaan yang baik dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

28. Dinas Perikanan

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perubahan adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang mengalami perubahan untuk mencapai sasaran pembangunan. Penyusunan dokumen ini merupakan amanah dari Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Dalam rangka mengoptimalkan sektor perikanan dan menangani berbagai tantangan yang dihadapi, Dinas Perikanan merasa perlu menyusun Rencana Kerja Perubahan. Rencana ini bertujuan untuk memberikan arah strategis yang jelas dalam pengembangan sektor perikanan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat pelaku usaha perikanan. Dengan adanya rencana kerja perubahan yang terstruktur, diharapkan dinas ini dapat lebih efektif dalam mengatasi masalah-masalah yang ada, memanfaatkan potensi perikanan yang belum tergali sepenuhnya, serta meningkatkan pelayanan dan kualitas produk perikanan.

Rencana Kerja Perubahan ini menjadi sangat penting mengingat sektor perikanan menghadapi berbagai tantangan dan perubahan yang kompleks. Faktor-faktor seperti perubahan iklim, penurunan produksi ikan, penangkapan ikan ilegal, dan penurunan pendapatan para nelayan perlu ditangani secara serius. Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan di sektor perikanan, perlu adanya perubahan dalam kebijakan, praktik pengelolaan sumber daya perikanan, serta pemberdayaan masyarakat setempat.

Rencana Kerja Perubahan ini juga menjadi respons atas arahan pemerintah yang semakin memperkuat peran sektor perikanan dalam perekonomian daerah. Dalam beberapa tahun terakhir, terjadi peningkatan kesadaran akan potensi sumber daya perikanan yang besar dan pentingnya menjaga keberlanjutan sektor ini. Dengan demikian, dinas perikanan perlu mengambil langkah-langkah strategis dalam mengoptimalkan sektor perikanan yang akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan ketahanan pangan.

Rencana Kerja Perubahan ini juga akan memperkuat sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan terkait, termasuk masyarakat nelayan, pembudidaya, pengolah dan pemasar hasil perikanan, akademisi, dan pemerintah daerah. Kolaborasi yang erat dengan pihak terkait diharapkan dapat mendorong terciptanya kebijakan yang lebih holistik dan berkelanjutan dalam pengembangan sektor perikanan. Dengan memperkuat kerjasama dan partisipasi aktif semua pihak, diharapkan Rencana Kerja

Perubahan ini dapat menghasilkan dampak positif yang nyata bagi peningkatan kesejahteraan pelaku usaha perikanan.

Dalam dokumen Rencana Kerja Perubahan ini, akan diuraikan perubahan anggaran untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Perikanan di Tahun 2024. Selain itu, akan dijelaskan langkah-langkah strategis yang akan diambil, baik dalam aspek pengelolaan sumber daya perikanan, pemberdayaan masyarakat, peningkatan kualitas produk perikanan, maupun pengembangan kerjasama dengan berbagai pihak terkait. Dokumen ini akan menjadi panduan yang komprehensif bagi Dinas Perikanan dalam melaksanakan berbagai kegiatan dan program perubahan yang diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi sektor perikanan dan kesejahteraan pelaku usaha perikanan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan dokumen Rencana Kerja adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai norma yuridis perencanaan program pusat dan daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 20017 no 58, Tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 4720)
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah nomor 18 Tahun 2017 tentangPerangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5887)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 jo Nomor 58 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 yang ditetapkan pada tanggal 18 Oktober 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2005 - 2025
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 08 Tahun 2020 Tanggal 29 Desember tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

13. Peraturan Bupati Nomor 106 Tahun 2017 tentang Tugas, Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Tangerang;
14. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perikanan Budidaya Air Tawar dan Air Payau pada Dinas Perikanan Kabupaten Tangerang;

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Hal ini bertujuan untuk :

1. Menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah.
2. Memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam Renja Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Rencana Kerja adalah sebagai beriku

KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN
- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perubahan Dinas Perikanan Tahun 2025 Triwulan II dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2025
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB IV PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perikanan Tahun 2025 (Triwulan II)

Hasil pelaksanaan Renja Tahun 2024 terangkum dalam evaluasi capaian sasaran Program Strategis/utama melalui indikator kinerja masing-masing sasaran. Berikut adalah hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Perikanan Kabupaten Tangerang Tahun 2024 dapat dirangkum dalam Tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1
Capaian Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Tangerang Tahun 2025 (Triwulan II)

No	Indikator Kinerja Utama	Indikator	2025		
			Target	Perkiraan Triwulan II	%
1	Meningkatya Produksi Ikan	Pertumbuhan Produksi Ikan (%)	1.05	0.51	48,57
2	Meningkatnya konsumsi Ikan	Tingkat Konsumsi Ikan (kg/ kapita/ th)	41.67	41.47	99,52
3	Meningkatnya akuntabilitas OPD	Nilai AKIP Dinas Perikanan (Nilai)	85.5	89.2	104,3

Evaluasi dan analisis Capaian Kinerja Anggaran Tahun 2024 dari masing-masing sasaran dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.2
Capaian Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Tangerang Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Tahun 2025 (Realisasi Triwulan II s/d 17 Jui)		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Meningkatya Produksi Ikan	17.443.500.570	6.599.960.721,00	37,83
2	Meningkatnya konsumsi Ikan	4.080.324.912	2.098.384.257,00	51,42
3	Meningkatnya akuntabilitas OPD	13.475.909.400,00	5.457.404.600,00	40,00

Tabel 2.3
Capaian Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Tangerang Tahun 2025

No	Program	Tahun 2025 (Realisasi Triwulan II s/d 17 Jui)		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	5.239.027.480,00	2.405.107.500,00	45,91
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	6.704.475.300,00	4.085.948.221,00	60.94
2	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	4.080.324.912,00	2.098.384.257,00	51,42
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	13.475.909.400,00	5.457.404.600,00	40%

Berdasarkan data realisasi anggaran dan capaian kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Tangerang pada triwulan II Tahun 2025 beberapa

kegiatan administratif dan operasional seperti pembayaran gaji ASN dan administrasi umum telah berjalan dengan baik. Namun, realisasi anggaran untuk program teknis di sektor perikanan tangkap masih tergolong rendah.

Berdasarkan data dan analisis di atas, terdapat beberapa program yang menunjukkan capaian yang rendah pada sub kegiatan. Hal ini ikarenakan kegiatan tersebut baru akan dilaksanakan pada triwulan 3 dan Triwulan 4. Meskipun demikian tetap perlu dilakukan evaluasi mendalam untuk mengidentifikasi kendala dan permasalahan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut. Selain itu, perlu pula disusun langkah-langkah perbaikan dan strategi untuk meningkatkan capaian program ke depannya. Transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran juga sangat penting untuk memastikan efisiensi dan efektivitas program-program tersebut. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:

- Program Pengelolaan Perikanan Tangkap mayoritas penganggaran ada di triwulan 3 dan 4. Untuk ke depannya perlu ditinjau kembali penentuan anggaran kas tersebut untuk meningkatkan capaian anggaran dan fisik kegiatan.
- Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan serta Program Pengelolaan Perikanan Budidaya perlu terus dipertahankan, namun mungkin juga diperlukan langkah-langkah inovatif untuk meningkatkan tingkat konsumsi ikan agar lebih optimal.

Dari evaluasi kinerja dengan penyerapan anggaran yang digunakan dalam mencapai sasaran. Selain indikator di atas, sesuai amanah Permendagri no 86 Tahun 2017 maka dalam pembuatan Rencana Kerja Dinas Perikanan fokus terhadap:

1. Layanan Urusan Pemerintah Pilihan, yaitu urusan perikanan dalam aspek daya saing daerah. Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia
2. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah. Analisis kinerja atas aspek kemampuan ekonomi daerah dilakukan terhadap indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita, pengeluaran konsumsi non pangan per kapita, produktivitas total daerah, dan nilai tukar petani.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2025

Dinas Perikanan pada tahun 2025 telah melaksanakan Program Kegiatan yang memprioritaskan pada meningkatkan produksi perikanan dan nilai tambah produk perikanan. Hal ini dalam rangka mengoptimalkan produksi ikan dengan memperhatikan sifat biologis ikan yang mudah membusuk bila tidak segera dilakukan penanganan. Sehingga di samping target produksi yang berlimpah. nilai tambah produk pun tetap bisa dipertahankan. Yang termasuk ke dalam produksi perikanan Kabupaten Tangerang adalah produksi perikanan dari usaha penangkapan dan budidaya ikan air tawar maupun payau. Sedangkan untuk penghitungan nilai tambah produk perikanan disepakati menggunakan produk-produk olahan yang umumnya ada di Kabupaten Tangerang dan merupakan produk binaan Dinas. Peningkatan Konsumsi Ikan dengan indikator kinerja Tingkat Konsumsi Ikan sebagai sasaran kedua menggantikan peningkatan nilai tambah produk olahan ikan. Kinerja pelayanan Dinas Perikanan Tahun 2024- Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024 s/d Tahun 2026 Kabupaten Tangerang/Tabel T-C.29 Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
Sasaran 1: Meningkatnya Produksi Perikanan		**Laju Produksi Perikanan**	**%**	**1.05**							
3.25.3	**Program pengelolaan perikanan tangkap**	**Laju Produksi Perikanan Tangkap**	**%**	**0.6**		**0.6**	**0.6**		**0.6**	**-**	**-**
3.25.3.202	Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Keluaran: Laporan Kegiatan Pemberdayaan yang Diperoleh Nelayan Kecil	Dokumen	3		**1**	**1**	**100**	**1**	**2**	**-**
		Hasil : Persentase daya serap pengetahuan kenelayanan	%	89%	**100**	**86**	**86**	**100**	86	**86**	**66,66**
3.25.3.202.1	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelay an Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	Orang	450		**150**	**150**	**100**	**150**	**350**	**77.77**
3.25.3.202.2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan	Jumlah kelompok nelayan kecil yang difasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaannya	Kelompok	9		**3**	**3**	**100**	**3**	**6**	**66,66**

Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil										
3.25.3.201	Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai. Danau. Waduk. Rawa. dan Genangan Air Lainnya yg dpt Diusahakan dlm 1 Daerah Kabupaten/ Kota	Keluaran: Laporan Kelompok Nelayan yang Mendapatkan Sarana dan Prasarana Penangkapan Ikan	Dokumen	3		**1**	**1**	**100**	**1**	**2**	**66,66**
		Hasil: Jumlah kelompok nelayan yang mendapatkan sarana dan prasarana penangkapan ikan	Kelompok	30							
3.25.3.201.1	Sub kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	Dokumen	1		**1**	**1**	**100**	**1**	**1**	**100**
3.25.3.201.2	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah prasarana usaha perikanan tangkap yang tersedia	Unit	3		**1**	**1**	**100**	2	**2**	**66,66**

Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
3.25.3.201.3	Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah sarana usaha perikanan tangkap yang terjamin dan tersedia	Unit	13.600		**5835**	**5835**	**100**	4500	**10.335**	**75,99**
3.25.3.203	Kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Keluaran: Laporan Nilai Raman TPI	Dokumen	3		**1**	**1**	**100**	**1**	**2**	**66,66**
		Hasil: Tercapainya target retribusi TPI	%	100		**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
3.25.3.203.2	Sub Kegiatan Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah layanan dalam rangka penyelenggaraan TPI	Layanan	3		**3**	**3**	**100**	**3**	**3**	**100**
3.25.04	**Program pengelolaan perikanan budidaya**	**Laju Produksi Perikanan Budidaya**	**%**	**1.50**		**1.5**	**1.5**	**100**	**1.5**	**1.5**	**100**
3.25.04.2.04	Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Keluaran 1 : Laporan Jumlah pembudidaya ikan yang memeperoleh kegiatan pemberdayaan	Dokumen	3		**1**	**1**	**100**	**1**	**2**	**66,66**

Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Hasil 1 : Terlaksananya pemberdayaan pembudidaya ikan	Orang	150							
		Keluaran 2: Laporan Jumlah produksi ikan hias	Dokumen	3							
		Hasil 2: Persentase peningkatan produksi ikan hias	ribu ekor	5.874							
3.25.04.2.04.01	Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1		**1**	**1**	**100**	**1**	**2**	**100**
3.25.04.2.04.04	Sub kegiatan Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yg teruji melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	Dokumen	87		**29**	**29**	**100**	**29**	**58**	**66,66**
3.25.04.2.04.06	Sub Kegiatan Perencanaan Pengembangan. Pemanfaatan dan Pelindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yg direncanakan. dikembangkan. Dimanfaaatkan dan dilindungi	Ha	6		**2.5**	**2.5**	**100**	**2.5**	**2.5**	**41,66**

Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
3.25.04.2.04.07	Sub Kegiatan Perencanaan dan pengembangan pemanfaatan Air untuk pembudidayaan ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya ikan yang mengikuti perencanaan dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Orang	90		**50**	**50**	**100**	**50**	**100**	
3.25.04.2.04.02	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang dibangun	Unit	3		**1**	**1**	**100**	**1**	**2**	**66,66**
3.25.04.2.04.05	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan ikan di darat	Jumlah Pembudidaya yang memperoleh pembinaan dan pemantauan pembudidayaan ikan di darat	Orang	100		**50**	**60**	**120**	**60**	**120**	**120**
3.25.04.2.02	Kegiatan Pemberdaayaan Pembudidaya Ikan Kecil	Keluaran: Laporan Jumlah produksi benih ikan konsumsi	Dokumen	3		**1**	**1**	**100**	**1**	**2**	**66,66**
		Hasil: Persentase peningkatan produksi benih ikan konsumsi	ribu ekor	231.918							
3.25.04.2.02.01	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	Kelompok	15		**5**	**5**	**100**	**5**	**10**	**66,66**

Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Pembudidaya Ikan Kecil										
Sasaran 2: Meningkatnya angka konsumsi ikan		**Angka Konsumsi Ikan**	**kg/ kapita/ thn**	**42.3**							
3.25.06	**Program pengelolaan dan pemasaran hasil perikanan**	**Persentase peningkatan produksi olahan perikanan**	**%**	**1.5**		**1.5**	**1.5**	**100**	**1.5**	**1.5**	
3.25.6.201	Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil-	Keluaran :Laporan Jumlah Data Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan	Dokumen	1		**1**	**1**	**100**	**1**	**1**	**100**
		Hasil: Persentase Pelaksanaan Penyusunan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan	%	100							
3.25.6.201.1	Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	Dokumen	1		**1**	**1**	**100**	**1**	**1**	**100**

Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota										
3.25.06.2.02	Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikananbagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Keluaran : Laporan Jumlah Kelompok yang terfasilitasi legalitas produk dan kelembagaan kelompok	Dokumen	3		**1**	**1**	**100**	**1**	**2**	**66,66**
		Hasil : Jumlah legalitas produk dan legalitas kelompok	sertifikat	12							
3.25.06.2.02.01	Sub Kegiatan Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standart pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	Unit usaha	12		**4**	**4**	**100**	**4**	**82**	
3.25.06.2.03	Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku	Keluaran : Laporan Jumlah kelompok yang terfasilitasi legalitas usahanya. kenaikan	Dokumen	3		**1**	**1**	**100**	**1**	**2**	**66,66**

Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	kelas kelompoknya. keterampilan dan pengetahuan									
		Hasil : Tersedianya laporan informasi. pemasaran dan sarana prasarana pengolahan hasil perikanan (Bentuk Monitoring dan evaluasi)	Kelompok	45							
3.25.06.2.03.01	Sub Kegiatan Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	ton	405.789		**133254**	**134264**	**100.76**	**135253**	**135253**	**33,33**
3.25.06.2.03.02	Sub Kegiatan Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha Perikanan skala mikro dan kecil dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota yang terfasilitasi	pelaku usaha	45		**19**	**20**	**105.26**	15	**35**	**77,77**

Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
Sasaran 3: Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah			Nilai	85.5							
3.25.01.2	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kab/kota	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	%	100	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
		Persentase pemenuhan administrasi keuangan. perencanaan. penganggaran. dan evaluasi kinerja perangkat daerah	%	100	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
3.25.01.2.01	Kegiatan Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	12		**4**	**4**	**100**	**4**	**8**	**66,66**
		Persentase Ketersediaan Dokumen perencanaan dan Pelaporan	Persen	100		**100**	**100**	**100**	**100**		
3.25.01.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6		**2**	**2**	**100**	**2**	**4**	**66,66**

Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Perencanaan Perangkat Daerah										
3.25.01.2.01.06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	3		**1**	**1**	**100**	**1**	**2**	**66,66**
3.25.01.2.01.07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	Laporan	3		**1**	**1**	**100**	**1**	**2**	**66,66**
3.25.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporanadminstrasi keuangan	Dokumen	6		**2**	**2**	**100**	**2**	**4**	
		Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100		**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
3.25.01.2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	Orang/ bulan	120		**34**	**34**	**100**	**34**	**68**	**56,66**
3.25.01.2.02.07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan	Laporan	3		**1**	**1**	**100**	**1**	**2**	**66,66**

Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD									
3.25.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Laporan Jumlah pegawai yang difasilitasi	Dokumen	3		**1**	**1**	**100**	**1**	**2**	**66,66**
		Laporan Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan & pemantapan selam	Dokumen	3							
		Jumlah pegawai yang difasilitasi	Orang	120							
		Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan & pemantapan selam	Orang	45							
3.25.01.2.05.09	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	195		**65**	**65**	**100**	**65**	**130**	**66,66**
3.25.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan Jumlah jenis kegiatan administrasi umum Perangkat Daerah	Dokumen	3		**1**	**1**	**100**	**1**	**2**	**66,66**

Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Jumlah jenis kegiatan administrasi umum Perangkat Daerah	Jenis	18							
3.25.01.2.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan	Paket	15		**5**	**5**	**100**	**5**	**10**	**66,66**
3.25.01.2.06.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	60		**20**	**20**	**100**	**20**	**40**	**66,66**
3.25.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	3		**1**	**1**	**100**	**1**	**2**	**66,66**
3.25.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	3		**1**	**1**	**100**	**1**	**2**	**66,66**
3.25.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	36		**12**	**12**	**100**	**12**	**24**	**66,66**
3.25.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	36		**12**	**12**	**100**	**12**	**24**	**66,66**

Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
3.25.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Jumlah Jenis Kegiatan Jasa Penunjang	Dokumen	3		**1**	**1**	**100**	**1**	**2**	**66,66**
		Jumlah Jenis Kegiatan Jasa Penunjang	Jenis	12							
3.25.01.2.08.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	3		**1**	**1**	**100**	**1**	**2**	**66,66**
3.25.01.2.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi. sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	6		**2**	**2**	**100**	**2**	**4**	**66,66**
3.25.01.2.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan Jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	3		**1**	**1**	**100**	**1**	**2**	**66,66**
		Jumlah jasa iklan/media cetak									
3.25.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Jumlah jenis kegiatan pemeliharaan barang milik daerah	Dokumen	3		**1**	**1**	**100**	**1**	**2**	**66,66**

Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Jumlah jenis kegiatan pemeliharaan barang milik daerah	Jenis	12							
3.25.01.2.09.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	15		**5**	**5**	**100**	**5**	**10**	**66,66**
3.25.01.2.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak. dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	69		**23**	**23**	**100**	**23**	**46**	**66,66**
3.25.01.2.09.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang	Unit	6		**2**	**2**	**100**	**2**	**4**	**66,66**

Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
3.25.01.2.09.07	Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Unit	12		**4**	**4**	**100**	**4**	**8**	**66,66**
3.25.01.2.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Unit	6		**2**	**2**	**100**	**2**	**4**	**66,66**

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perikanan Kabupaten Tangerang/Tabel T-C.30

NO	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	SPM /standar nasional	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian	
							Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2024	Tahun 2025 (Perkiraan Triwulan II)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Meningkatkan pendapatan pelaku usaha perikanan	Nilai Tukar Nelayan & Pembudidaya (NTNP)									
			1. Meningkatnya Produksi Perikanan	1.Laju Produksi Perikanan	-	%	1,05	1,05	1,05	1.07	0.51
			2.Meningkatnya Angka Konsumsi Ikan	2.Angka Konsumsi Ikan (kg/ kapita/ thn)	-	kg/ kapita/ thn)	41,06	41,67	42,3	41,26	41.47
2.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP OPD	3.Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	3.Nilai AKIP OPD	-	Nilai	85,5	85,5	85,5	75,15	89.2
				Jumlah total produksi perikanan (Tangkap dan Budidaya) di seluruh Kab/Kota	-	Ton	43.110	43.562	44.022	43.737,92	11.267,01
				a. Produksi Perikanan Tangkap	-	Ton	21.383	21.510	21.639	22.052,09	5.617,99
				b. Produksi Perikanan Budidaya	-	Ton	21.727	22.052	22.383	21.685,82	5.649,02

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD Tahun 2025

Isu Strategis Perangkat Daerah Adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan perangkat di masa yang akan datang dalam rangka menunjang pembangunan daerah.

Pembangunan perekonomian sub sektor perikanan dipengaruhi oleh dinamika perekonomian provinsi, dan nasional Isu strategis perangkat daerah yang akan ditangani pada kurun waktu 5 (lima) tahun sebagaimana tertuang pada Renstra Dinas Perikanan periode 2024 - 2026 sebagai berikut:

1. Rendahnya pendapatan yang diperoleh dalam menjalankan usaha perikanan. Biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi masih relatif besar dibandingkan dengan jumlah perolehan yang mereka dapatkan dalam sekali produksi sehingga margin yang diperoleh masih belum memuaskan. Tingginya biaya produksi budidaya perikanan terutama pada biaya produksi pakan. Maka dari itu perlu dilakukannya pembuatan pakan ikan alternatif.
2. Rendahnya produktivitas sumber daya. Produktivitas yang rendah merupakan dampak dari belum optimalnya produksi perikanan. Sistem Produksi yang masih Tradisional atau minimnya penggunaan teknologi. Kualitas produk menurun berdampak pada turunnya nilai harga produk. Hal ini membutuhkan perlakuan khusus agar ikan tetap memiliki nilai tambah dan peningkatan ketersediaan sarpras alat tangkap ramah lingkungan, penangkapan ikan invasif, penebaran benih ikan di PUD (Perairan Umum Daratan).
3. Rendahnya tingkat konsumsi ikan. Maka dari itu, Perlunya peningkatan penanganan pasca produksi hasil produksi perikanan terutama pengolahan hasil perikanan dengan memperbaiki kualitas dan ketersediaan komoditas ikan, sehingga daya saing produk yang meningkat dapat mendorong peningkatan daya beli masyarakat terhadap produk perikanan.
4. Terbatasnya akses pemasaran produk olahan hasil produksi perikanan. Maka dari itu, Pentingnya strategi Pemasaran Produk Perikanan untuk Tingkatkan Penjualan dengan membangun Kemitraan dan Jaringan Distribusi.

Tabel 2.5
Isu Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Tangerang

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Pendapatan Nelayan/ pembudidaya ikan masih rendah	Rendahnya Capaian Produksi Perikanan	Sistem Produksi di Nelayan, Pembudidaya masih Tradisional
	Rendahnya	Rendahnya ketersediaan produk ikan

	Konsumsi Ikan Masyarakat	Minimnya akses pemasaran

Sumber : Data Dinas Perikanan Kab. Tangerang Tahun 2024

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal Program Kegiatan Dinas Perikanan yang masuk ke dalam RKPD tahun 2025 mengalami rasionalisasi. Dinas Perikanan melalui Program dan Kegiatan Tahun 2025 diantaranya untuk mendukung program penanganan kemiskinan ekstrim dan stunting. Kemiskinan ekstrim di sektor perikanan dan kelautan di Kabupaten Tangerang merupakan masalah yang kompleks dan memerlukan solusi komprehensif. Faktor-faktor seperti kurangnya akses terhadap sumber daya, teknologi, modal, dan pelatihan yang memadai, serta perubahan iklim, berkontribusi pada kondisi kemiskinan yang persisten.

Adapun peran Dinas Perikanan dalam upaya penurunan angka stunting di Kabupaten Tangerang dilakukan dalam beberapa bentuk. Diantaranya yaitu melalui peningkatan produksi dan aksesibilitas pangan yang kaya akan zat gizi, serta sosialisasi mengenai manfaat konsumsi ikan dan produk perikanan. Dinas Perikanan juga dapat membantu meningkatkan ketersediaan dan kesadaran akan makanan bergizi di masyarakat.

Selain itu, Rancangan awal Program Kegiatan Dinas Perikanan megalami rasionalisme dikarenakan adanya efisiensi berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 adalah Instruksi Presiden yang ditujukan untuk meningkatkan efisiensi belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2025 dan hasil tindak lanjut dari Program 100 hari kerja Bupati terpilih.

Dinas Perikanan Tahun 2025 melaksanakan 4 Program. 14 Kegiatan dan 34 Sub Kegiatan dengan Total Kebutuhan Belanja Dinas Perikanan Tahun Anggaran 2025 yaitu Rp. 28.627.308.362 (APBD murni) dan Rp.35.179.942.020.- (APBD rasionalisasi).

Tabel 2.6
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025 Kabupaten Tangerang/Tabel T-C.31
Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Kode Rekening	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
	BELANJA DINAS					**28.627.308.362**	**BELANJA DINAS**					**35.179.942.020**
3.25.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Dinas Perikanan**	**Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan**	**%**	**100**	**13.847.406.432**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Dinas Perikanan**	**Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan**	**%**	**100**	**13.656.111.538**
3.25.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Perikanan	Jumlah Dokumen Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	4	185.509.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Perikanan	Jumlah Dokumen Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	4	129.382.670
3.25.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Perikanan	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	135.207.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Perikanan	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	90.264.000
3.25.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Perikanan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	24.387.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Perikanan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	17.963.000
3.25.01.2.01.0005	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Perikanan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	Laporan	1	25.915.000,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Perikanan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	Laporan	1	21.155.670

Kode Rekening	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinas Perikanan	Jumlah dokumen laporan adminstrasi keuangan	Dokumen	2	9.459.564.932	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinas Perikanan	Jumlah dokumen laporan adminstrasi keuangan	Dokumen	2	9.518.900.070
3.25.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Perikanan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan	Orang/Bulan	40	9.437.301.932,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Perikanan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan	Orang/Bulan	40	9.499.909.070,00
3.25.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas Perikanan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	22.263.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas Perikanan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	18.991.000
3.25.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dinas Perikanan	Laporan Jumlah pegawai yang difasilitasi	Dokumen	1	403.871.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dinas Perikanan	Laporan Jumlah pegawai yang difasilitasi	Dokumen	1	304.371.000
3.25.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dinas Perikanan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	65	403.871.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dinas Perikanan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	65	304.371.000
3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas Perikanan	Laporan jumlah jenis kegiatan administrasi umum perangkat daerah	Dokumen		1.393.982.100	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas Perikanan	Laporan jumlah jenis kegiatan administrasi umum perangkat daerah	Dokumen		1.149.644.100
3.25.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Perikanan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan	Paket	5	462.930.100	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Perikanan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan	Paket	5	462.930.100
3.25.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas Perikanan	Jumlah Paket Bahan Logistik	Paket	20	153.466.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas Perikanan	Jumlah Paket Bahan Logistik	Paket	20	153.466.000

Kode Rekening	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
			Kantor yang Disediakan						Kantor yang Disediakan			
3.25.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dinas Perikanan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	36.735.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dinas Perikanan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	36.735.000
3.25.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dinas Perikanan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	142.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dinas Perikanan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	137.270.000
3.25.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dinas Perikanan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	70.080.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dinas Perikanan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	51.100.000
3.25.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Perikanan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	528.771.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Perikanan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	308.143.000
3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Perikanan	Laporan jumlah jenis kegiatan jasa penunjang	Dokumen	1	1.803.216.908	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Perikanan	Laporan jumlah jenis kegiatan jasa penunjang	Dokumen	1	1.908.669.068
3.25.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Perikanan	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	2	13.521.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Perikanan	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	2	1.373.160
3.25.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Perikanan	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi. sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	1	358.203.988	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Perikanan	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi. sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	1	358.203.988
3.25.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Perikanan	Jumlah laporan penyediaan Jasa	Laporan	1	1.431.491.920	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Perikanan	Jumlah laporan penyediaan Jasa	Laporan	1	1.549.091.920

Kode Rekening	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
			pelayanan umum kantor yang disediakan						pelayanan umum kantor yang disediakan			
3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Perikanan	Laporan jumlah jenis kegiatan pemeliharaan barang milik daerah	Dokumen	1	601.262.492	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Perikanan	Laporan jumlah jenis kegiatan pemeliharaan barang milik daerah	Dokumen	1	645.149.630
3.25.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas Perikanan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	5	182.721.964	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas Perikanan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	5	182.721.964
3.25.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Perikanan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	23	360.913.228	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Perikanan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	23	360.913.228
3.25.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Perikanan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang terpelihara	Unit	2	53.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Perikanan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang terpelihara	Unit	2	53.000.000
3.25.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Dinas Perikanan	Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Unit	4	4.627.300	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Dinas Perikanan	Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Unit	4	4.627.300
3.25.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinas Perikanan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Unit	2	43.887.138	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinas Perikanan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Unit	2	43.887.138
3.25.03	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	Dinas Perikanan	**Laju Produksi Perikanan Tangkap**	**%**	**0.6**	**4.718.782.630**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	Dinas Perikanan	**Laju Produksi Perikanan Tangkap**	**%**	**0.6**	**7.438.997.990**

Kode Rekening	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Dinas Perikanan	Laporan Kelompok Nelayan yang Mendapatkan Sarana dan Prasarana Penangkapan Ikan	Dokumen	1	3.897.103.750	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Dinas Perikanan	Laporan Kelompok Nelayan yang Mendapatkan Sarana dan Prasarana Penangkapan Ikan	Dokumen	1	6.733.911.020
3.25.03.2.01.0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	Unit	1	284.609.000	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	Unit	1	1.267.672.510
3.25.03.2.01.0004	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	Unit	4500	3.612.494.750	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	Unit	4500	5.466.238.510
3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perikanan	Laporan Kegiatan Pemberdayaan yang Diperoleh Nelayan Kecil	Dokumen	1	547.899.510	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perikanan	Laporan Kegiatan Pemberdayaan yang Diperoleh Nelayan Kecil	Dokumen	1	528.571.600
3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Dinas Perikanan	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	Orang	150	333.163.320	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Dinas Perikanan	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	Orang	150	310.104.350
3.25.03.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Dinas Perikanan	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	Kelompok	3	214.736.190	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Dinas Perikanan	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	Kelompok	3	218.467.250
3.25.03.2.03	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Dinas Perikanan	Laporan raman TPI	Dokumen	1	273.779.370	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Dinas Perikanan	Laporan raman TPI	Dokumen	1	176.515.370

Kode Rekening	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
3.25.03.2.03.0002	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (UPTD TPI)	Dinas Perikanan	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Layanan	1	273.779.370	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (UPTD TPI)	Dinas Perikanan	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Layanan	1	176.515.370
3.25.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	Dinas Perikanan	**Laju Produksi Perikanan Budidaya**	**%**	**1.5**	**6.278.390.300**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	Dinas Perikanan	**Laju Produksi Perikanan Budidaya**	**%**	**1.5**	**10.004.502.580**
3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Dinas Perikanan	Laporan Jumlah produksi benih ikan konsumsi	Dokumen	1	393.070.000	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Dinas Perikanan	Laporan Jumlah produksi benih ikan konsumsi	Dokumen	1	388.970.000
3.25.04.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil (UPTD PB ATAP)	Dinas Perikanan	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	Kelompok	5	393.070.000	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil (UPTD PB ATAP)	Dinas Perikanan	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	Kelompok	5	388.970.000
3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Dinas Perikanan	Laporan Jumlah pembudidaya ikan yang memeperoleh kegiatan pemberdayaan	Dokumen	1	5.885.320.300	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Dinas Perikanan	Laporan Jumlah pembudidaya ikan yang memeperoleh kegiatan pemberdayaan	Dokumen	1	9.615.532.580
3.25.04.2.04.0004	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perikanan	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	Dokumen	29	170.160.400	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perikanan	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	Dokumen	29	163.070.400
3.25.04.2.04.0012	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan	Dinas Perikanan	Jumlah Usulan Dokumen Pemanfataan dan	Dokumen	2	1.087.257.100	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan	Dinas Perikanan	Jumlah Usulan Dokumen Pemanfataan dan	Dokumen	2	3.384.281.980

Kode Rekening	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
	Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat		Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan				Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat		Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan			
3.25.04.2.04.0011	Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Dinas Perikanan	Jumlah Unit Usaha Pembudidayaan Ikan yang Memanfaatkan Air untuk Pembudidayaan Ikan	Unit	1	4.182.214.000	Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Dinas Perikanan	Jumlah Unit Usaha Pembudidayaan Ikan yang Memanfaatkan Air untuk Pembudidayaan Ikan	Unit	1	5.652.311.400
3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (UPTD PB ATAP)	Dinas Perikanan	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Unit	1	343.486.800	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (UPTD PB ATAP)	Dinas Perikanan	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Unit	1	343.486.800
3.25.04.2.04.0010	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan ikan di darat (UPTD P BATAP)	Dinas Perikanan	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Unit	25	102.202.000	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan ikan di darat (UPTD P BATAP)	Dinas Perikanan	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Unit	25	72.382.000
3.25.06	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**Dinas Perikanan**	**Persentase peningkatan produksi olahan perikanan**	**%**	**1.5**	**3.782.729.000**	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**Dinas Perikanan**	**Persentase peningkatan produksi olahan perikanan**	**%**	**1.5**	**4.080.324.912**
3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Dinas Perikanan	Laporan Jumlah Kelompok yang terfasilitasi legalitas produk dan kelembagaan kelompok	Dokumen	1	300.000.000	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Dinas Perikanan	Laporan Jumlah Kelompok yang terfasilitasi legalitas produk dan kelembagaan kelompok	Dokumen	1	262.210.000
3.25.06.2.02.0002	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan	Dinas Perikanan	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan	Unit Usaha	4	300.000.000	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha	Dinas Perikanan	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan	Unit Usaha	4	262.210.000

Kode Rekening	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
	Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko		Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko				Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko		Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko			
3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Dinas Perikanan	Laporan Jumlah kelompok yang terfasilitasi legalitas usahanya . kenaikan kelas kelompoknya . keterampilan dan pengetahuan	Dokumen	1	3.482.729.000	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Dinas Perikanan	Laporan Jumlah kelompok yang terfasilitasi legalitas usahanya . kenaikan kelas kelompoknya . keterampilan dan pengetahuan	Dokumen	1	3.818.114.912
3.25.06.2.03.0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perikanan	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Ton	135253	1.119.838.000	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perikanan	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Ton	135253	1.567.654.000
3.25.06.2.03.0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam	Dinas Perikanan	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1	Pelaku Usaha	15	2.362.891.000	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perikanan	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1	Pelaku Usaha	15	2.250.460.912

Kode Rekening	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
	1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		(Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi						(Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi			

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan Kegiatan Tahun 2025 berupa rencana aksi Dinas untuk mendukung program penanganan kemiskinan ekstrim, inflasi dan stunting. Dinas Perikanan bertanggung jawab untuk mengembangkan dan meningkatkan sektor perikanan, baik melalui kegiatan penangkapan ikan di perairan laut maupun budidaya ikan di perairan darat. Melalui kebijakan yang mendukung, pengawasan yang ketat, dan pengelolaan yang berkelanjutan, Dinas Perikanan dapat memberikan peluang ekonomi bagi masyarakat yang tinggal di daerah pesisir dan pedalaman yang bergantung pada sektor perikanan.

Dalam meningkatkan sektor perikanan, Dinas Perikanan memberikan pelatihan dan pendidikan kepada nelayan. Pelatihan ini meliputi teknik penangkapan ikan yang berkelanjutan, pengelolaan sumber daya perikanan, pengolahan dan pemasaran ikan yang efektif, serta pengembangan usaha perikanan skala kecil. Dalam pelaksanaannya Bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap melalui rencana aksi pendistribusian sarana tangkap menargetkan 4500 unit Sarana penangkapan ikan dan peningkatan kegiatan usaha penangkapan ikan. Selain itu, Bidang Pengelolaan Perikanan Pembudidaya menargetkan laju produksi perikanan budidaya dengan sebesar 1,5 % budidaya ikan. Dinas Perikanan juga dalam rangka penanganan stunting memastikan ketersediaan dan aksesibilitas pangan yang bergizi, terutama pangan laut dan ikan. Dalam pelaksaannya Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan menargetkan angka konsumsi ikan 41,67 kg/kapita/tahun melalui rencana aksi Gerakan Memasyakatkan Makan Ikan (Gemarikan). Maka dari itu dalam mendukung penangan kemiskinan ekstrim dan stunting tersebut, program dan kegiatan dimasukan kedalam program kegiatan yang sudah ada.

Selain itu program yang telah dilakukan Dinas Perikanan Tahun 2025 dalam mendukung program 100 Hari Kerja Bupati. Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu.

- Penyerahan Sarana Pengolahan Perikanan di Desa Mekar Bakti Kec.Panongan. Desa Jambe Kec.Jambe, Desa Gandaria Kec.Mekarbaru, Desa Ketapang Kec.Mauk. Adapun kegiatan yang dilakukan berupa Pelatih diverfikasi olahan kepada 60 Pengolah, Pembagian 5.100 Distribusi olahan ikan serta pembagian 4 Paket(Freezer dan food processor,handsealer,mixer,Kompor dll) sarpas olahan ikan dalam rangka ketahanan pangan dan penangan stunting.
- Penyerahan bantuan 11 unit kapal <5 GT, Penyerahan sarana Prasarana perikanan yaitu 33 Unit Jaring rampus, 11 Unit Mesin Kapal dan 11 Unit coolbox, serta bantuan premi BPJS Ketenagakerjaan bagi 10.000 Nelayan yang telah dilaksanakan di Dermaga Ketapang Desa Ketapang Kecamatan Mauk pada tanggal 17 April 2025.
- Pencanangan Kampung budidaya di Desa Gandaria Kec. Mekarbaru berupa Pembangunan gerbang kampung tematik budidaya lele, Pembangunan hangar pakan alternatif, pemberian benih lele serta pakan untuk 5 Kelompok pembudidaya sebanyak 87 Orang dan panen ikan lele sebanyak 300 kg yang telah dilaksanakan pada tanggal 17 Mei 2025.
- Program kolaborasi ketahanan pangan dengan budidaya ikan lele bersama polri di 10 Polsek berupa pemberian bantuan 100 biovlog

dan 100.000 benih, pakan ikan 11 Ton dan aerator 50 set untuk 10 kelompok pembudidaya dengan jumlah keterlibatan 50 pembudidaya dan 10 polsek.

Tabel 2.7
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Perubahan/ Tabel T-C.32 Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Kode Rekening	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran	Target Capaian Kinerja	Catatan
3.25.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Dinas Perikanan**	**Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan**	**%**	**100**	
3.25.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Perikanan	Jumlah Dokumen Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	4	
3.25.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Perikanan	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	
3.25.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Perikanan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	
3.25.01.2.01.0005	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Perikanan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	Laporan	1	
3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinas Perikanan	Jumlah dokumen laporan adminstrasi keuangan	Dokumen	2	
3.25.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Perikanan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan	Orang/Bulan	40	
3.25.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas Perikanan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	
3.25.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dinas Perikanan	Laporan Jumlah pegawai yang difasilitasi	Dokumen	1	
3.25.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dinas Perikanan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti	Orang	65	

Kode Rekening	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran	Target Capaian Kinerja	Catatan
3.25.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Dinas Perikanan**	**Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan**	**%**	**100**	
			Pendidikan dan Pelatihan			
3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas Perikanan	Laporan jumlah jenis kegiatan administrasi umum perangkat daerah	Dokumen		
3.25.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Perikanan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan	Paket	5	
3.25.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas Perikanan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	20	
3.25.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dinas Perikanan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	
3.25.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dinas Perikanan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	
3.25.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dinas Perikanan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	
3.25.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Perikanan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	
3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Perikanan	Laporan jumlah jenis kegiatan jasa penunjang	Dokumen	1	
3.25.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Perikanan	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	2	
3.25.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Perikanan	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi. sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	1	
3.25.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Perikanan	Jumlah laporan penyediaan Jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	1	
3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Perikanan	Laporan jumlah jenis kegiatan pemeliharaan barang milik daerah	Dokumen	1	
3.25.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas Perikanan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	5	

Kode Rekening	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran	Target Capaian Kinerja	Catatan
3.25.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Dinas Perikanan**	**Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan**	**%**	**100**	
3.25.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Perikanan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	23	
3.25.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Perikanan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang terpelihara	Unit	2	
3.25.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Dinas Perikanan	Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Unit	4	
3.25.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinas Perikanan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Unit	2	
3.25.03	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	Dinas Perikanan	**Laju Produksi Perikanan Tangkap**	**%**	**0.6**	
3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Dinas Perikanan	Laporan Kelompok Nelayan yang Mendapatkan Sarana dan Prasarana Penangkapan Ikan	Dokumen	1	
3.25.03.2.01.0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	Unit	1	
3.25.03.2.01.0004	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	Unit	4500	
3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perikanan	Laporan Kegiatan Pemberdayaan yang Diperoleh Nelayan Kecil	Dokumen	1	
3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Dinas Perikanan	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	Orang	150	
3.25.03.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Dinas Perikanan	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	Kelompok	3	
3.25.03.2.03	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Dinas Perikanan	Laporan raman TPI	Dokumen	1	
3.25.03.2.03.0002	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (UPTD TPI)	Dinas Perikanan	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat	Layanan	1	

Kode Rekening	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran	Target Capaian Kinerja	Catatan
3.25.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Dinas Perikanan**	**Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan**	**%**	**100**	
			Pelelangan Ikan (TPI)			
3.25.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	Dinas Perikanan	**Laju Produksi Perikanan Budidaya**	**%**	**1.5**	
3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Dinas Perikanan	Laporan Jumlah produksi benih ikan konsumsi	Dokumen	1	
3.25.04.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil (UPTD PB ATAP)	Dinas Perikanan	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	Kelompok	5	
3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Dinas Perikanan	Laporan Jumlah pembudidaya ikan yang memeperoleh kegiatan pemberdayaan	Dokumen	1	
3.25.04.2.04.0004	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perikanan	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	Dokumen	29	
3.25.04.2.04.0012	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Dinas Perikanan	Jumlah Usulan Dokumen Pemanfataan dan Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan	Dokumen	2	
3.25.04.2.04.0011	Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Dinas Perikanan	Jumlah Unit Usaha Pembudidayaan Ikan yang Memanfaatkan Air untuk Pembudidayaan Ikan	Unit	1	
3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (UPTD PB ATAP)	Dinas Perikanan	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Unit	1	
3.25.04.2.04.0010	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan ikan di darat (UPTD P BATAP)	Dinas Perikanan	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Unit	25	
3.25.06	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**Dinas Perikanan**	**Persentase peningkatan produksi olahan perikanan**	**%**	**1.5**	

Kode Rekening	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran	Target Capaian Kinerja	Catatan
3.25.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Dinas Perikanan**	**Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan**	**%**	**100**	
3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Dinas Perikanan	Laporan Jumlah Kelompok yang terfasilitasi legalitas produk dan kelembagaan kelompok	Dokumen	1	
3.25.06.2.02.0002	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Dinas Perikanan	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Unit Usaha	4	
3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Dinas Perikanan	Laporan Jumlah kelompok yang terfasilitasi legalitas usahanya . kenaikan kelas kelompoknya . keterampilan dan pengetahuan	Dokumen	1	
3.25.06.2.03.0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perikanan	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Ton	135253	
3.25.06.2.03.0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perikanan	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	Pelaku Usaha	15	

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Dinas Perikanan melalui Program dan Kegiatan Tahun 2025 merupakan rencana aksi Dinas untuk menguatkan kembali Produksi perikanan dan nilai tambah produk perikanan. Selain itu, juga mendukung program penanganan kemiskinan ekstrim, inflasi dan stunting. Dinas Perikanan memainkan peran yang signifikan dalam upaya penanganan sebagai sektor yang berpotensi tinggi untuk menghasilkan pendapatan dan menciptakan lapangan kerja, perikanan memiliki potensi besar dalam mengurangi tingkat kemiskinan ekstrim, inflasi dan stunting di Masyarakat.

Berdasarkan hasil pemetaan Program Kegiatan sesuai Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi. validasi dan inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi. Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. maka dilakukan penyesuaian/pemetaan Program Kegiatan berbasis kinerja yang tertuang dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 serta pengalokasian anggaran yang dibutuhkan dalam mencapai kinerja output dari masing-masing sub kegiatan. Hal ini dilakukan agar Program dan Kegiatan yang direncanakan Dinas Perikanan dapat berjalan efektif dan efisien. serta dapat memberikan hasil yang maksimal dalam mendukung pertumbuhan ekonomi melalui sektor perikanan.

Dalam pelaksanaannya. Dinas Perikanan juga akan bekerja sama dengan berbagai pihak. seperti kelompok nelayan. kelompok budidaya. lembaga Pendidikan dan penelitian. serta pihak terkait lainnya guna meningkatkan kualitas dan produktivitas sektor perikanan secara berkelanjutan. Selain itu, Dinas Perikanan akan menggunakan sistem informasi dan teknologi yang terintegrasi. sehingga dapat memantau dan mengevaluasi kinerja program secara lebih efektif dan memperkuat jaringan kerja sama dengan berbagai pihak. termasuk pemerintah pusat. pemerintah provinsi. serta instansi terkait lainnya. guna memaksimalkan potensi sektor perikanan di wilayah Kabupaten Tangerang.

Dinas Perikanan telah memperoleh pagu anggaran untuk Tahun 2025 Perubahan yang ditetapkan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Tangerang sebesar Rp. 35.179.942.020 terdiri dari 4 program. 14 kegiatan dan 37 sub kegiatan dengan rincian program sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki indikator kinerja sebagai berikut :
   - Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan dengan target 100%
   - Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah dengan target 100%
2. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap. yang memiliki indikator Laju Produksi Perikanan Tangkap dengan target 0.6%.
3. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya. yang memiliki indikator Laju Produksi Perikanan Budidaya dengan target 1,5%.
4. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan. yang memiliki indikator persentase peningkatan produksi olahan perikanan dengan target 1,5%.

Jika target Program Dinas dapat dicapai maka target sasaran Kepala Dinas (pada Tabel 4.1) yang telah dicanangkan dalam Renstra Dinas akan

dapat terealisasi. Program Dinas dilaksanakan melalui Sub Kegiatan-Sub Kegiatan yang memiliki target kinerja output (keluaran) sebagaimana pada Tabel berikut.

Tabel 3.1
Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025 Berdasarkan Hasil Pengerjaan/Tabel T-C.33 Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Kode Rekening	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran	Rencana Tahun 2025			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
	BELANJA DINAS					**35.179.942.020**				**21.141.198.674**
3.25.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Dinas Perikanan**	**Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan**	**%**	**100**	**13.656.116.538**	**APBD**		**100**	**13.041.198.674**
3.25.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Perikanan	Jumlah Dokumen Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	4	129.382.670	APBD		4	275.000.000
3.25.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Perikanan	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	90.264.000	APBD		2	130.000.000
3.25.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Perikanan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	17.963.000	APBD		1	45.000.000
3.25.01.2.01.0005	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Perikanan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	Laporan	1	21.155.670	APBD		1	100.000.000

Kode Rekening	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran	Rencana Tahun 2025			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinas Perikanan	Jumlah dokumen laporan adminstrasi keuangan	Dokumen	2	9.518.900.070	APBD		2	9.656.198.674
3.25.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Perikanan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan	Orang/Bulan	40	9.499.909.070	APBD		40	9.596.198.674
3.25.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas Perikanan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	18.991.000	APBD		1	60.000.000
3.25.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dinas Perikanan	Laporan Jumlah pegawai yang difasilitasi	Dokumen	1	304.371.000	APBD		1	600.000.000
3.25.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dinas Perikanan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	65	304.371.000	APBD		65	600.000.000
3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas Perikanan	Laporan jumlah jenis kegiatan administrasi umum perangkat daerah	Dokumen		1.149.644.100	APBD			965.000.000
3.25.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Perikanan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan	Paket	5	462.930.100	APBD		5	200.000.000
3.25.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas Perikanan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	20	153.466.000	APBD		20	150.000.000
3.25.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dinas Perikanan	Jumlah Paket Barang Cetakan	Paket	1	36.735.000	APBD		1	30.000.000

Kode Rekening	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran	Rencana Tahun 2025			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
			dan Penggandaan yang Disediakan							
3.25.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dinas Perikanan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	137.270.000	APBD		1	10.000.000
3.25.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dinas Perikanan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	51.100.000	APBD		12	75.000.000
3.25.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Perikanan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	308.143.000	APBD		12	500.000.000
3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Perikanan	Laporan jumlah jenis kegiatan jasa penunjang	Dokumen	1	1.908.669.068	APBD		1	335.000.000
3.25.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Perikanan	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	2	1.373.160	APBD		2	30.000.000
3.25.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Perikanan	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi. sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	1	358.203.988	APBD		1	180.000.000
3.25.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Perikanan	Jumlah laporan penyediaan Jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	1	1.549.091.920	APBD		1	125.000.000
3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Perikanan	Laporan jumlah jenis kegiatan pemeliharaan barang milik daerah	Dokumen	1	645.149.630	APBD		1	1.210.000.000

Kode Rekening	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran	Rencana Tahun 2025			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
3.25.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas Perikanan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	5	182.721.964	APBD		5	260.000.000
3.25.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Perikanan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	23	360.913.228	APBD		23	500.000.000
3.25.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Perikanan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang terpelihara	Unit	2	53.000.000	APBD		2	50.000.000
3.25.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Dinas Perikanan	Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Unit	4	4.627.300	APBD		4	100.000.000
3.25.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinas Perikanan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Unit	2	43.887.138	APBD		2	300.000.000
3.25.03	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**Dinas Perikanan**	**Laju Produksi Perikanan Tangkap**	**%**	**0.6**	**7.438.997.990**	**APBD**		**0.6**	**3.250.000.000**
3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Dinas Perikanan	Laporan Kelompok Nelayan yang Mendapatkan Sarana dan Prasarana Penangkapan Ikan	Dokumen	1	6.733.911.020	APBD		1	1.900.000.000
3.25.03.2.01.0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	Unit	1	1.267.672.510	APBD		1	200.000.000

Kode Rekening	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran	Rencana Tahun 2025			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
3.25.03.2.01.0004	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	Unit	4500	5.466.238.510	APBD		4500	1.700.000.000
3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perikanan	Laporan Kegiatan Pemberdayaan yang Diperoleh Nelayan Kecil	Dokumen	1	528.571.600	APBD		1	550.000.000
3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Dinas Perikanan	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	Orang	150	310.104.350	APBD		150	500.000.000
3.25.03.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Dinas Perikanan	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	Kelompok	3	218.467.250	APBD		3	50.000.000
3.25.03.2.03	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Dinas Perikanan	Laporan raman TPI	Dokumen	1	176.515.370	APBD		1	800.000.000
3.25.03.2.03.0002	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (UPTD TPI)	Dinas Perikanan	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Layanan	1	176.515.370	APBD		1	800.000.000
3.25.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**Dinas Perikanan**	**Laju Produksi Perikanan Budidaya**	**%**	**1.5**	**10.004.502.580**	**APBD**		**1.5**	**3.400.000.000**
3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Dinas Perikanan	Laporan Jumlah produksi benih ikan konsumsi	Dokumen	1	388.970.000	APBD		1	100.000.000
3.25.04.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya	Dinas Perikanan	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan	Kelompok	5	388.970.000	APBD		5	100.000.000

Kode Rekening	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran	Rencana Tahun 2025			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
	Ikan Kecil (UPTD PB ATAP)		Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas							
3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Dinas Perikanan	Laporan Jumlah pembudidaya ikan yang memeperoleh kegiatan pemberdayaan	Dokumen	1	9.615.532.580	APBD		1	3.300.000.000
3.25.04.2.04.0004	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perikanan	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	Dokumen	29	163.070.400	APBD		29	200.000.000
3.25.04.2.04.0012	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Dinas Perikanan	Jumlah Usulan Dokumen Pemanfataan dan Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan	Dokumen	2	3.384.281.980	APBD		2	1.000.000.000
3.25.04.2.04.0011	Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Dinas Perikanan	Jumlah Unit Usaha Pembudidayaan Ikan yang Memanfaatkan Air untuk Pembudidayaan Ikan	Unit	1	5.652.311.400	APBD		1	1.000.000.000
3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (UPTD PB ATAP)	Dinas Perikanan	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Unit	1	343.486.800	APBD		1	1.000.000.000
3.25.04.2.04.0010	Pembinaan dan Pemantauan	Dinas Perikanan	Jumlah Pembudidaya yang	Unit	25	72.382.000	APBD		25	100.000.000

Kode Rekening	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran	Rencana Tahun 2025			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
	Pembudidayaan ikan di darat (UPTD P BATAP)		Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat							
3.25.06	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**Dinas Perikanan**	**Persentase peningkatan produksi olahan perikanan**	**%**	**1.5**	**4.080.324.912**	APBD		**1.5**	1.450.000.000
3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Dinas Perikanan	Laporan Jumlah Kelompok yang terfasilitasi legalitas produk dan kelembagaan kelompok	Dokumen	1	262.210.000	APBD		1	200.000.000
3.25.06.2.02.0002	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Dinas Perikanan	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Unit Usaha	4	262.210.000	APBD		4	200.000.000
3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Dinas Perikanan	Laporan Jumlah kelompok yang terfasilitasi legalitas usahanya . kenaikan kelas kelompoknya .	Dokumen	1	3.818.114.912	APBD		1	1.250.000.000

Kode Rekening	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran	Rencana Tahun 2025			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
			keterampilan dan pengetahuan							
3.25.06.2.03.0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perikanan	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Ton	135253	1.567.654.000	APBD		135253	500.000.000
3.25.06.2.03.0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perikanan	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	Pelaku Usaha	15	2.250.460.912	APBD		15	750.000.000

Penyesuaian/pemetaan Program Kegiatan berbasis kinerja yang tertuang dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 serta pengalokasian anggaran yang dibutuhkan dalam mencapai kinerja output dari masing-masing sub kegiatan. Pengalokasian Anggaran Dinas Perikanan juga dalam rangka penanggulangan kemiskinan ekstrem, stunting dan inflasi secara konvergen dan terintegrasi Pemerintah Daerah memastikan program tersebut tepat sasaran pada lokasi khusus. Maka dari itu, Dinas Perikanan dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem, stunting dan inflasi yang merupakan kebijakan atau program pusat maupun pemerintah daerah dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat melalui bantuan dan jaminan sosial, pemerdayaan masyarakat serta usaha ekonomi mikro kecil. Adapun perubahan anggaran pada Dinas Perikanan sebagai berikut :

Tabel 3.2
Mandatory Perubahan Anggaran Tahun 2025

Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Sumber Dana
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	THR Non ASN dan Honor 13	117.600.000	PAD (Pendapatan Asli Daerah)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Gaji dan Tunjangan ASN	62.606.548	PAD (Pendapatan Asli Daerah)
Pengelolaan Perikanan Tangkap	Kapal Nelayan	1.183.907.000	PAD (Pendapatan Asli Daerah)
Pengelolaan Perikanan Tangkap	BPJS Naker Nelayan	183.708.000	PAD (Pendapatan Asli Daerah)
Pengelolaan Perikanan Budidaya	Kolaborasi Budidaya Danramil, POLRES, dan Reguler	999.742.400	PAD (Pendapatan Asli Daerah)
Pengelolaan Perikanan Budidaya	Perbaikan Jogging Track	2.300.284.880	PAD (Pendapatan Asli Daerah)
Pengelolaan Perikanan Budidaya	Perbaikan Tambak udang		
Pengelolaan Perikanan Budidaya	Perbaikan Saluran Air		
Pengelolaan Perikanan Tangkap	Perbaikan TPI dan Dermaga	799.356.100	PAD (Pendapatan Asli Daerah)
Pengelolaan Perikanan Tangkap	Akta Notaris	33.000.000	PAD (Pendapatan Asli Daerah)

BAB V
PENUTUP

Dalam rangka untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Dinas Perikanan Kabupaten Tangerang telah menyusun Dokumen Renja Perubahan 2025 sebagai penjabaran dari kebijakan Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Tangerang (2024-2026). Dokumen Renja Perubahan 2025 ini akan menjadi panduan dalam penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan menjadi pedoman bagi seluruh bidang lingkup Dinas Perikanan Kabupaten Tangerang serta semua pemangku kepentingan dalam mendukung pencapaian target-target tersebut.

Renja Perubahan 2025 ini juga akan menjadi acuan bagi Dinas Perikanan dalam melakukan pembangunan di tahun mendatang. Pada pelaksanaannya membutuhkan komitmen. kesepahaman. kerjasama. transparansi. konsistensi. inovasi. dan rasa tanggung jawab yang tinggi dari seluruh unsur pemerintah daerah baik eksekutif dan legislatif. masyarakat. hingga dunia usaha untuk mensukseskan program yang ditetapkan.

Dengan mencapai tujuan pembangunan tahunan. diharapkan subsektor perikanan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah sektor unggulan dan mendukung Misi 2 Kabupaten Tangerang yaitu “Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Maju dan Berdaya Saing Berbasis pada Potensi Keunggulan Lokal”.

Demikian gambaran tentang Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Perikanan Tahun 2025. dengan berdasar pada azas perencanaan yang berbasis kinerja. Penyusunan Renja Perubahan Dinas Perikanan Tahun 2025 ini diharapkan dapat menjadi acuan dan pedoman bagi bidang-bidang lingkup Dinas Perikanan Kabupaten Tangerang dalam penyusunan program/kegiatan dan anggaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di masing-masing bidang. Dengan memperhatikan prinsip efektifitas dan efisiensi. diharapkan target-target yang telah tercantum dalam Renja Perubahan Tahun 2025 untuk mencapai Renstra dapat terpenuhi. Rencana Kerja Tahunan Dinas Perikanan Tahun 2025 ini berlaku sejak ditetapkan. dan apabila pagu anggaran yang tersedia tidak sesuai dengan perencanaan. dikarenakan adanya penyesuaian dengan kekuatan anggaran. kiranya dapat dilakukan penyesuaian kembali terhadap target kinerja.

29. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perubahan Renja Perangkat Daerah dijadikan sebagai pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD, Prioritas, dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan, Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Perangkat Daerah dan kemudian berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kabupaten Tangerang.

Penyusunan rancangan akhir Perubahan Renja Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tangerang Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada kerangka arahan yang telah dirumuskan dalam rancangan akhir RPD Kabupaten Tangerang serta didasarkan pada evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan tahun 2025 sampai dengan triwulan I, sehingga dokumen Rancangan Akhir Perubahan Renja Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan ini dapat digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKPA) Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P).

1.2. Landasan Hukum

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tangerang Tahun 2025 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, beserta Pemutakhirannya melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
22. Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru;
24. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten

Tahun 2005-2025 Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 26;

25. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten 2010-2030;
26. Peraturan Gubernur Banten Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2023-2026;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2009 Nomor 12);
28. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1116) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2022 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0222);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang Tahun 2011-2031 (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2020 Nomor 9):
30. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023;
31. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 09 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tangerang;
32. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026.
33. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
34. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penghitungan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Renja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tangerang Tahun 2025 dimaksudkan untuk:

1. Memberikan arah dan pedoman bagi aparatur Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tangerang dalam melaksanakan tugasnya, sehingga sasaran dan target capaian pembangunan yang dilaksanakan di dalam program dan kegiatan

yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tahun 2025 dapat berjalan sesuai dengan kebijakan.
2. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) tentang perubahan rencana kerja pada tahun berjalan.

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun 2025 :

1. Mewujudkan penjabaran prioritas pembangunan Tahun 2025.
2. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan pertanian dan ketahanan pangan antar wilayah, antar sektor serta antar lembaga pemerintahan.
3. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi hasil pembangunan.
4. Tercapainya target pembangunan dengan menggunakan sumberdaya secara efesien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun Sistematika Penulisan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 pada Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tangerang adalah sebagai berikut :

KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN

Bab ini mencakup tentang latar belakang penyusunan Renja Perubahan Tahun 2025, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan penyusunan Renja Perubahan Tahun 2025 dan Sistematika Penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU

Bab ini mencakup tentang Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan I, Analisis Kinerja Pelayanan, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Review terhadap Rancangan RKPD Perubahan dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini mencakup tentang rencana kerja perubahan dan anggaran tahun 2025.

BAB IV PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan. Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Kinerja sendiri merupakan keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungandengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

Pengukuran Laporan Kinerja dilakukan dengan menggunakan konsep Value For Money, Penggunaan konsep dimaksud memerlukan indikator-indikator sebagai berikut:

a. Indikator Masukan (input), untuk mengukur jumlah sumberdaya seperti anggaran (dana), SDM, peralatan, material, dan masukan lainnya untuk melakukan suatu kegiatan. Dengan meninjau distribusi sumberdaya dapat dianalisis apakah alokasi sumberdaya yang dimiliki telah sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan.
b. Indikator Keluaran (Output), merupakan indikator yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan, baik berupa fisik maupun berupa non fisik.
c. lndikator Hasil (Outcome), merupakan indikator yang menunjukkan telah dicapainya maksud dan tujuan dari kegiatan-kegiatan yang telah selesai dilaksanakan atauindikator yang mencerminan berfungsinya keluaran pada jangka menengah.

Sedangkan Laporan Keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban keuangan yang berbentuk laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Adapun evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan sampai dengan triwulan I tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 2.1
Laporan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tangerang

PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Capaian (%)	Realisasi Fisik Kegiatan (%)	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Satuan	Target indikator	Realisasi Indikator	Capaian (%)
1	2	3	4=(3/2)*100	5	6	7	8	9	10=(9/8)*100
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	67.581.158.459	12.450.334.804	18,42%						
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	**1.254.727.800**	**1.890.000**	**0.15 %**	**0.15 %**	**Persentase Lumbung Pangan yang Aktif**	**%**	**-**	**-**	**0.00 %**
Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1.254.727.800	1.890.000	0.15 %	0.15 %	Persentase Lumbung Pangan yang Aktif	%	-	-	0.00 %
Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	1.254.727.800	1.890.000	0.15 %	0.15 %	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	Unit	-	-	0.00 %
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	**5.255.155.390**	**70.952.600**	**1.35 %**	**8.58 %**	**Persentase 12 Jenis Pangan Strategis yang Mengalami Kenaikan Harga < 5-10%**	**%**	**25**	**25**	**100.00 %**
					Persentase Ketersediaan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP)	**%**	**-**	**-**	**0.00 %**
					Persentase Capaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	**%**	**-**	**-**	**0.00 %**
Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	2.289.038.990	69.492.600	3.04 %	15.00 %	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	%	-	-	0.00 %
Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	2.041.078.590	15.417.600	0.76 %	0.80 %	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	Laporan	-	-	0.00 %
Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	147.623.400	40.880.000	27.69 %	27.76 %	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Laporan	-	-	0.00 %
Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	39.947.000	11.215.000	28.07 %	28.14 %	Informasi Harga dan Pasokan Pangan	Dokumen	-	-	0.00 %
Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	60.390.000	1.980.000	3.28 %	3.31 %	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	Dokumen	-	-	0.00 %
Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	2.786.497.000	1.460.000	0.05 %	0.05 %	Persentase Ketersediaan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP)	%	-	-	0.00 %

PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Capaian (%)	Realisasi Fisik Kegiatan (%)	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Satuan	Target indikator	Realisasi Indikator	Capaian (%)
1	2	3	4=(3/2)*100	5	6	7	8	9	10=(9/8)*100
Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	2.786.497.000	1.460.000	0.05 %	0.05 %	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Ton	-	-	0.00 %
Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	179.619.400	0	0.00 %	0.00 %	Persentase Capaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	%	-	-	0.00 %
Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	54.671.000	0	0.00 %	0.00 %	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Dokumen	-	-	0.00 %
Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	124.948.400	0	0.00 %	0.00 %	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Laporan	-	-	0.00 %
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	**604.603.940**	**61.638.070**	**10.19 %**	**11.04 %**	**Peta Kerentanan dan Kerawanan Pangan (Food Security and Vulnerability Atlas/FSVA)**	**Dokumen**	**-**	**-**	**0.00 %**
					Persentase Jumlah Desa Rentan Rawan Pangan yang Diintervensi	**%**	**-**	**-**	**0.00 %**
Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	57.856.870	3.715.000	6.42 %	6.50 %	Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Dokumen	-	-	0.00 %
Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	57.856.870	3.715.000	6.42 %	6.50 %	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	Dokumen	-	-	0.00 %
Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	546.747.070	57.923.070	10.59 %	13.31 %	Persentase Desa Rentan Rawan Pangan yang Diintervensi	%	-	-	0.00 %
Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	327.217.000	0	0.00 %	0.00 %	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	-	-	0.00 %
Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	219.530.070	57.923.070	26.39 %	26.61 %	Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Dokumen	-	-	0.00 %
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	**134.489.500**	**33.907.500**	**25.21 %**	**66.24 %**	**Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan Pangan**	**%**	**-**	**-**	**0.00 %**
Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	134.489.500	33.907.500	25.21 %	66.24 %	Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan Pangan	%	-	-	0.00 %
Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	21.919.900	21.607.900	98.58 %	98.78 %	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	-	-	0.00 %

PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Capaian (%)	Realisasi Fisik Kegiatan (%)	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Satuan	Target indikator	Realisasi Indikator	Capaian (%)
1	2	3	4=(3/2)*100	5	6	7	8	9	10=(9/8)*100
Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	102.712.600	2.709.600	2.64 %	2.64 %	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	Dokumen	-	-	0.00 %
Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	9.857.000	9.590.000	97.29 %	97.29 %	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Dokumen	-	-	0.00 %
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	**11.857.393.280**	**1.948.141.450**	**16.43 %**	**18.69 %**	**Persentase Ketersediaan Sarana Pertanian**	**%**	**-**	**-**	**0.00 %**
Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	4.710.557.600	33.607.000	0.71 %	5.11 %	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Laporan	-	-	0.00 %
Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	341.029.000	18.175.000	5.33 %	5.50 %	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Laporan	-	-	0.00 %
Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	4.212.352.000	0	0.00 %	0.00 %	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Laporan	-	-	0.00 %
Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	157.176.600	15.432.000	9.82 %	100.00 %	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak	Ton	-	-	0.00 %
Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	6.252.241.900	1.805.351.950	28.88 %	27.78 %	Jumlah Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	%	-	-	0.00 %
Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	521.675.800	0	0.00 %	0.00 %	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Dokumen	-	-	0.00 %
Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	3.497.565.000	0	0.00 %	0.00 %	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Dokumen	-	-	0.00 %
Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman	2.233.001.100	1.805.351.950	80.85 %	83.34 %	Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian	Varietas Unggul Baru (VUB)	-	-	0.00 %
Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	385.309.230	71.087.500	18.45 %	18.63 %	Jumlah Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan	-	-	0.00 %
Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	385.309.230	71.087.500	18.45 %	18.63 %	Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar	Laporan	-	-	0.00 %

PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Capaian (%)	Realisasi Fisik Kegiatan (%)	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Satuan	Target indikator	Realisasi Indikator	Capaian (%)
1	2	3	4=(3/2)*100	5	6	7	8	9	10=(9/8)*100
Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	72.245.400	9.000.000	12.46 %	12.46 %	Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Laporan	-	-	0.00 %
Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	72.245.400	9.000.000	12.46 %	12.46 %	Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Laporan	-	-	0.00 %
Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	437.039.150	29.095.000	6.66 %	28.54 %	Jumlah Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Laporan	-	-	0.00 %
Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	385.208.000	295.000	0.08 %	0.08 %	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	ekor	-	-	0.00 %
Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	51.831.150	28.800.000	55.57 %	57.00 %	Jumlah benih ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	dosis	20	20	100.00 %
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	**6.321.757.000**	**0**	**0.00 %**	**0.00 %**	**Persentase Ketersediaan Prasarana Pertanian**	**%**	**-**	**-**	**0.00 %**
Pengembangan Prasarana Pertanian	6.321.757.000	0	0.00 %	0.00 %	Jumlah Ketersediaan Prasarana Pertanian	%	-	-	0.00 %
Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	6.321.757.000	0	0.00 %	0.00 %	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola	Dokumen	-	-	0.00 %
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	**3.335.182.210**	**191.712.200**	**5.75 %**	**7.84 %**	**Persentase Penanganan Jumlah Penyakit Hewan yang ditangani**	**%**	**18.75**	**18.75**	**100.00 %**
					Persentase Produk Hewan yang Memenuhi Persyaratan SNI	**%**	**-**	**-**	**0.00 %**
Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	933.630.334	114.845.200	12.30 %	12.93 %	Terlaksananya penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam daerah Kabupaten/ Kota	Laporan	-	-	0.00 %
Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	933.630.334	114.845.200	12.30 %	12.93 %	Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan	Wilayah	1	1	100.00 %
Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik	373.142.916	31.134.000	8.34 %	8.34 %	Terlaksananya Pelayanan Jasa Medik Veteriner	ekor	250	250	100.00 %

PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Capaian (%)	Realisasi Fisik Kegiatan (%)	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Satuan	Target indikator	Realisasi Indikator	Capaian (%)
1	2	3	4=(3/2)*100	5	6	7	8	9	10=(9/8)*100
Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota									
Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	373.142.916	31.134.000	8.34 %	8.34 %	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Laporan	-	-	0.00 %
Penerapan dan Pengawasaan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	2.028.408.960	45.733.000	2.25 %	2.25 %	Terlaksananya Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Laporan	-	-	0.00 %
Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	2.028.408.960	45.733.000	2.25 %	2.25 %	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Laporan	-	-	0.00 %
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	**2.935.247.980**	**617.387.900**	**21.03 %**	**17.84 %**	**Persentase SDM Penyuluh Pertanian dan Kelompok Tani yang Meningkat Kapasitasnya**	**%**	**-**	**-**	**0.00 %**
Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	2.935.247.980	617.387.900	21.03 %	17.84 %	Persentase Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian dan Kelompok Tani	%	-	-	0.00 %
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	719.022.600	436.312.900	60.68 %	63.71 %	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Unit	2	2	100.00 %
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	1.088.838.400	110.949.000	10.19 %	10.72 %	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Unit	-	-	0.00 %
Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	475.180.580	70.126.000	14.76 %	14.76 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Unit	2	2	100.00 %
Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	150.788.600	0	0.00 %	0.00 %	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	Unit	-	-	0.00 %
Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	501.417.800	0	0.00 %	0.00 %	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	orang	-	-	0.00 %
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**35.882.601.359**	**9.591.949.084**	**26.73 %**	**40.19 %**	**Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan**	**%**	**25**	**25**	**100.00 %**
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	147.349.000	20.200.500	13.71 %	28.54 %	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	%	25	25	100.00 %
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	130.149.000	11.963.000	9.19 %	9.19 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1	1	100.00 %
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17.200.000	8.237.500	47.89 %	47.89 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	1	100.00 %
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	31.604.922.373	8.210.112.118	25.98 %	28.00 %	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	25	25	100.00 %

PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Capaian (%)	Realisasi Fisik Kegiatan (%)	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Satuan	Target indikator	Realisasi Indikator	Capaian (%)
1	2	3	4=(3/2)*100	5	6	7	8	9	10=(9/8)*100
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	31.604.922.373	8.210.112.118	25.98 %	28.00 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	136	133	97.79 %
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4.978.000	1.200.000	24.11 %	24.11 %	Persentase Ketersediaan Dokumen Laporan Barang Milik Daerah	%	25	25	100.00 %
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	4.978.000	1.200.000	24.11 %	24.11 %	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	-	-	0.00 %
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	245.436.000	14.650.000	5.97 %	6.13 %	Prosentase aparatur yang meningkat kapasitasnya	%	25	25	100.00 %
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	245.436.000	14.650.000	5.97 %	6.13 %	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	-	-	0.00 %
Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.902.640.542	963.066.610	50.62 %	64.57 %	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	25	25	100.00 %
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	22.348.000	21.385.000	95.69 %	100.00 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100.00 %
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.001.886.442	667.842.500	66.66 %	71.57 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100.00 %
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	41.456.500	40.780.000	98.37 %	100.00 %	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	1	100.00 %
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	114.668.000	110.377.110	96.26 %	100.00 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100.00 %
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	72.068.600	53.353.000	74.03 %	81.53 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	100.00 %
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9.250.000	2.029.000	21.94 %	25.00 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	-	-	0.00 %
Fasilitasi Kunjungan Tamu	151.318.000	53.050.000	35.06 %	35.06 %	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	-	-	0.00 %
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	489.645.000	14.250.000	2.91 %	3.43 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	-	-	0.00 %
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	175.892.000	0	0.00 %	0.00 %	Persentase pemenuhan Jasa Penunjang	%	25	25	100.00 %
Pengadaan Mebel	175.892.000	0	0.00 %	0.00 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	-	-	0.00 %

PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Capaian (%)	Realisasi Fisik Kegiatan (%)	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Satuan	Target indikator	Realisasi Indikator	Capaian (%)
1	2	3	4=(3/2)*100	5	6	7	8	9	10=(9/8)*100
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.206.673.568	315.697.401	26.16 %	27.15 %	Persentase pemenuhan Jasa Penunjang	%	25	25	100.00 %
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	236.590.000	53.467.401	22.60 %	25.00 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	-	-	0.00 %
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	970.083.568	262.230.000	27.03 %	29.30 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	-	-	0.00 %
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	594.709.876	67.022.455	11.27 %	18.56 %	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	%	25	25	100.00 %
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	573.709.876	62.522.455	10.90 %	12.12 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1	100.00 %
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21.000.000	4.500.000	21.43 %	25.00 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5	5	100.00 %

Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tangerang pada tahun 2025 memiliki 9 Program, 25 Kegiatan dan 51 Sub Kegiatan. Dari tabel diatas, realisasi anggaran serta pencapaian target dan kinerja Program dan Kegiatan s/d Triwulan I tahun 2025 dapat kami sampaikan realisasi anggaran sebesar Rp.12.450.334.804,- atau 18.42% dari anggaran Rp.67.581.158.459,- dengan rincian per-program sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangandengan dengan realisasi anggaran sebesar Rp.1.898.000,- atau 0,15% dari anggaran sebesar Rp.1.254.727.800,-. Kegiatan pada program ini dimulai pada triwulan II.
2. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakatdengan dengan realisasi anggaran sebesar Rp.70.952.600,- atau 1,35% dari anggaran sebesar Rp.5.255.155.390,-. Kegiatan ini dimulai pada triwulan II.
3. Program Penanganan Kerawanan Pangan dengan dengan realisasi anggaran sebesar Rp.61.638.070atau 10,19% dari anggaran sebesar Rp.604.603.940,-.
4. Program Pengawasan Keamanan Pangandengan dengan realisasi anggaran sebesar Rp.33.907.500,- atau 25,21% dari anggaran sebesar Rp.134.489.500,-.
5. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian dengan realisasi anggaran sebesar Rp.1.918.031.450,- atau 16,18% dari anggaran sebesar Rp.11.857.393.280,-.
6. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian dengan realisasi anggaran sebesar Rp.0,- atau 0,00% dari anggaran sebesar Rp.6.321.757.000,-.
7. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dengan realisasi anggaran sebesar Rp.160.578.200,- atau 4,81% dari anggaran sebesar Rp.3.335.182.210,-.
8. Program Penyuluhan Pertanian dengan realisasi anggaran sebesar Rp.617.387.900,- atau 21,03% dari anggaran sebesar Rp.2.935.247.980,-
9. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan realisasi anggaran sebesar Rp.9.585.949.084,- atau 26,71% dari anggaran sebesar Rp.35.882.601.359,-.

Evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan, berdasarkan realisasi target kinerja keluaran dari kegiatan yang dilaksanakan serta capaian dari target program/kegiatan Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan,. Pada bab ini memuat kajian (reviu) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan, Tahun 2023 dan capaian tahun 2024, serta pencapaian target Renstra Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan berdasarkan realisasi program kegiatan pelaksanaan Renja Tahun 2024.

Adapun evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan, tersaji pada Tabel 2.2 sebagai berikut:

Tabel 2.2 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra
Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024 -2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 (tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (tahun n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024/ tahun n-1)	Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (tahun berjalan/n-1)	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**									
2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Lumbung Pangan yang Aktif	64,47% %	-	-	-	-	43.42 %	39.47 %	90.90 %
2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lumbung Pangan yang Aktif	64,47% %	-	-	-	-	43.42 %	39.47 %	90.90 %
2.09.02.2.01.0003	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	15 Unit	-	-	-	-	5 Unit	5 Unit	100.00 %
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase 12 Jenis Pangan Strategis yang Mengalami Kenaikan Harga < 5-10%	100,00 %	-	-	-	-	100 %	100 %	100.00 %
		Persentase Ketersediaan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP)	29,15% %	-	-	-	-	16.90 %	14.98 %	88.64 %
		Persentase Capaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	86,00 %	84.4	88	91,6	104,09%	85 %	89.4 %	105.18 %
2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	100,00 %	-	-	-	-	80 %	98.33 %	122.91 %
2.09.03.2.01.0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	1 Laporan	-	-	-	-	1 Laporan	1 Laporan	100.00 %
2.09.03.2.01.0014	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis	24 Laporan	-	-	-	-	24 Laporan	24 Laporan	100.00 %
2.09.03.2.01.0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	13 Dokumen	-	-	-	-	13 Dokumen	13 Dokumen	100.00 %

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024 -2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 (tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (tahun n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024/ tahun n-1)	Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (tahun berjalan/n-1)	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP)	29,15% %	-	-	-	-	16.90 %	14.98 %	88.64 %
2.09.03.2.02.0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	80 Ton	25	25	25	100,00%	80 Ton	71.8 Ton	89.75 %
2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Persentase Capaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	86,00 %	84.4	88	91,6	104,09%	85 %	89.4 %	105.18 %
2.09.03.2.04.0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00 %
2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1 Laporan	1	1	1	100,00%	1 Laporan	1 Laporan	100.00 %
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Peta Kerentanan dan Kerawanan Pangan (Food Security and Vulnerability Atlas/FSVA)	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00 %
		Persentase Jumlah Desa Rentan Rawan Pangan yang Diintervensi	100 %	12,73	12,73	12,73	100,00%	72.72 %	73.64 %	101.27 %
2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	1 Dokumen	1	1	1	100,00%	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00 %
2.09.04.2.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	1 Dokumen	1	1	1	100,00%	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00 %
2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Desa Rentan Rawan Pangan yang Diintervensi	100 %	-	-	-	-	72.72 %	73.64 %	101.27 %
2.09.04.2.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	14	14	14	100,00%	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00 %

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024 -2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 (tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (tahun n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024/ tahun n-1)	Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (tahun berjalan/n-1)	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan Pangan	90 %	-	-	-	-	80 %	98.33 %	122.91 %
2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan Pangan	90 %	-	-	-	-	80 %	98.33 %	122.91 %
2.09.05.2.01.0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00 %
2.09.05.2.01.0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00 %
3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**									
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Ketersediaan Sarana Pertanian	60 %	-	-	-	-	30 %	25,3 %	84,33%
3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	1 Laporan	-	-	-	-	1 Laporan	1 Laporan	100.00 %
3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	1 Laporan	-	-	-	-	1 Laporan	1 Laporan	100.00 %
3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	60 %	-	-	-	-	30 %	25.3 %	84.33 %
3.27.02.2.02.0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	1 Dokumen	-	2	2	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00 %

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024 -2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 (tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (tahun n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024/ tahun n-1)	Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (tahun berjalan/n-1)	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.27.02.2.02.0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	1 Dokumen	-	1	1	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00 %
3.27.02.2.02.0004	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman	Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian	1 Varietas Unggul Baru (VUB)	-	-	-	-	1 Varietas Unggul Baru (VUB)	1 Varietas Unggul Baru (VUB)	100.00 %
3.27.02.2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 Kegiatan	-	-	-	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.00 %
3.27.02.2.03.0002	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar	1 Laporan	-	1	1	100%	1 Laporan	1 Laporan	100.00 %
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Ketersediaan Prasarana Pertanian	75 %	-	-	-	-	55 %	55 %	100.00 %
3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Ketersediaan Prasarana Pertanian	75 %	-	-	-	-	52 %	52 %	100.00 %
3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	16 Laporan	-	-	-	-	16 Laporan	16 Laporan	100.00 %
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Penanganan Jumlah Penyakit Hewan yang ditangani	80 %	5	5	5	100%	70 %	70 %	100.00 %
		Persentase Produk Hewan yang Memenuhi Persyaratan SNI	68 %	5	5	5	100%	64 %	64 %	100.00 %
3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam daerah Kabupaten/ Kota	1 Laporan	-	-	-	-	1 Laporan	1 Laporan	100.00 %

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024 -2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 (tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (tahun n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024/ tahun n-1)		Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (tahun berjalan/n-1)		
						Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian		Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
3.27.04.2.01.0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	2	Laporan	-	-	-	-	2	Laporan	2	Laporan	100.00 %
3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelayanan Jasa Medik Veteriner	1000	ekor	-	-	-	-	1000	ekor	1720	ekor	172.00 %
3.27.04.2.03.0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	1	Laporan	-	-	-	-	1	Laporan	1	Laporan	100.00 %
3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasaan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Terlaksananya Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	1	Laporan	-	-	-	-	1	Laporan	1	Laporan	100.00 %
3.27.04.2.04.0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	2	Laporan	-	-	-	-	2	Laporan	2	Laporan	100.00 %
3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase Jumlah Unit Usaha Pertanian yang Dilakukan Pengawasan dan Pembinaan	100	%	-	-	-	-	100	%	100	%	100.00 %
3.27.06.2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Unit Usaha Pertanian yang Dilakukan Pengawasan dan Pembinaan	100	%	-	-	-	-	100	%	100	%	100.00 %
3.27.06.2.01.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	75	Laporan	-	-	-	-	75	Laporan	75	Laporan	100.00 %
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase SDM Penyuluh Pertanian dan Kelompok Tani yang Meningkat Kapasitasnya	80	%	-	-	-	-	60	%	60	%	100.00 %
3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian dan Kelompok Tani	80	%	-	-	-	-	60	%	60	%	100.00 %
3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di	8	Unit	-	-	-	-	8	Unit	8	Unit	100.00 %

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024 -2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 (tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (tahun n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024/ tahun n-1)	Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (tahun berjalan/n-1)	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya								
3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	426 Unit	-	-	-	-	300 Unit	300 Unit	100.00 %
3.27.07.2.01.0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	8 Unit	-	-	-	-	8 Unit	8 Unit	100.00 %
3.27.07.2.01.0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	8 Unit	-	-	-	-	8 Unit	8 Unit	100.00 %
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	100 %	100	100	100	100%	100 %	100 %	100.00 %
3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	100 %	100	100	100	100%	100 %	100 %	100.00 %
3.27.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00 %
3.27.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	-	-	-	-	1 Laporan	1 Laporan	100.00 %
3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100	100	100	100%	100 %	100 %	100.00 %
3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	149 Orang	-	-	-	-	149 Orang	149 Orang	100.00 %
3.27.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Laporan Barang Milik Daerah	100 %	100	100	100	100%	100 %	100 %	100.00 %
3.27.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	-	-	-	-	1 Laporan	1 Laporan	100.00 %
3.27.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase aparatur yang meningkat kapasitasnya	100 %	100	100	100	100%	100 %	100 %	100.00 %

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024 -2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 (tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (tahun n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024/ tahun n-1)		Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (tahun berjalan/n-1)		
						Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian		Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
3.27.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	149	Paket	-	-	-	-	1	Paket	1	Paket	100.00 %
3.27.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	180	Orang	-	-	-	-	149	Orang	149	Orang	100.00 %
3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	%	100	100	100	100%	100	%	100	%	100.00 %
3.27.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	-	-	-	-	1	Paket	1	Paket	100.00 %
3.27.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	-	-	-	-	1	Paket	1	Paket	100.00 %
3.27.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Paket	-	-	-	-	1	Paket	1	Paket	100.00 %
3.27.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	-	-	-	-	1	Paket	1	Paket	100.00 %
3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	-	-	-	-	1	Paket	1	Paket	100.00 %
3.27.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	Dokumen	-	-	-	-	1	Dokumen	1	Dokumen	100.00 %
3.27.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	Laporan	-	-	-	-	1	Laporan	1	Laporan	100.00 %
3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Laporan	-	-	-	-	1	Laporan	1	Laporan	100.00 %
3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Jasa Penunjang	100	%					100	%	100	%	100.00 %
3.27.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	Unit	-	-	-	-	3	Unit	3	Unit	100.00 %

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024 -2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 (tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (tahun n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024/ tahun n-1)		Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (tahun berjalan/n-1)		
						Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian		Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Jasa Penunjang	100	%	100	100	100	100%	100	%	100	%	100.00 %
3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	Laporan	-	-	-	-	1	Laporan	1	Laporan	100.00 %
3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	Laporan	-	-	-	-	1	Laporan	1	Laporan	100.00 %
3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100	%	100	100	100	100%	100	%	100	%	100.00 %
3.27.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	16	Unit	-	-	-	-	16	Unit	16	Unit	100.00 %
3.27.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3	Unit	-	-	-	-	3	Unit	3	Unit	100.00 %

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan, pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator outcome atau minimal output dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tangerang menetapkan Indikator Kinerja Utama yang merupakan ukuran keberhasilan baik kuantitatif maupun kualitatif atau menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran strategi yang ditetapkan. Pencapaian terhadap Indikator Kinerja tersebut dapat ditabulasikan menjadi sebagai berikut pada Tabel 2.3. :

Tabel 2.3.
Pencapaian Kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

No	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian	Proyeksi		Catatan Analisis
		2024	2025	2026	2024	2025	2026	
1	Persentase ketersediaan cadangan pangan pemerintah daerah (CPPD)	16,90%	23,03%	29,15%	14,98%	23,03%	29,15%	Jumlah Ketersediaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) / Jumlah Target CadanganPemerintah mengacu pada Permentan No. 11 Tahun 2018
2	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	85,00%	85,50%	86,00%	89,40%	85,50%	86,00%	Skor Pola Pangan harapan / 95 (Skor Pola Pangan Harapan Ideal) X 100%
3	Laju Peningkatan Jumlah Produksi Pertanian	1%	1%	1%	1%	1%	1%	Jumlah Produksi Pertanian Tahun (n) - Jumlah Produksi Pertanian Tahun (n-1) / Jumlah Produksi Pertanian Tahun (n-1) X 100%
4	Hasil Penilaian LKIP	80,50	81,00	81,50	81,35	81,00	81,50	Nilai LKIP

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tangerang

lsu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan karena dampaknya yang signifikan di masa depan. Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Beberapa hal dasar pertimbangan dalam pemilihan isu strategis di Kabupaten Tangerang yaitu:

1. Merupakan tugas dan tanggung jawab Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tangerang;
2. Besarnya dampak yang ditimbulkan terhadap publik;
3. Tingkat kemungkinan/kemudahan penanganan;
4. Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan;
5. Memiliki daya ungkit terhadap pencapaian untuk pembangunan daerah;
6. Janji politik yang harus diwujudkan.

Isu-isu strategis yang menjadi prioritas bagi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tangerang, adalah sebagai berikut :

1. Pemantapan ketersediaan pangan baik hewani maupun nabati dalam jumlah dan keragaman untuk mendukung konsumsi pangan sesuai kaidah kesehatan dan gizi seimbang dan pengembangan cadangan pangan hidup (pekarangan, lahan desa, dan lahan tidur);
2. Optimalisasi pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) bekerjasama dengan dengan Perum BULOG atau lembaga lain sesuai ketentuan perundangan;
3. Pengembangan distribusi pangan yang merata, harga stabil dan terjangkau (aksesibilitas) dengan mendorong dan mendukung upaya peningkatan daya beli dan mengurangi jumlah penduduk yang miskin;
4. Penguatan kelembagaan lumbung pangan masyarakat dan lembaga cadangan pangan komunitas lainnya dan pengembangan sistem cadangan pangan melalui Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) dengan optimalisasi Gapoktan dan Poktan ataupun lembaga usaha lainnya;
5. Pemantauan impor pangan (pemasukan pangan dari luar daerah);
6. Peningkatan efisiensi dan efektivitas intervensi bantuan pangan di daerah rentan rawan pangan dan mengelola pangan pokok fortifikasi bagi kelompok khusus (rentan gizi buruk dan rentan rawan pangan);
7. Penanganan daerah rentan rawan pangan yang terprogram melalui penumbuhan dan pengembangan desa mandiri pangan serta mengoptimalkan tim Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten;
8. Pengembangan dan percepatan penganekaragaman/ diversifikasi konsumsi pangan berbasis pangan lokal melalui upaya pengolahan pangan berbahan baku palawija serta tepung

umbi-umbian lokal diantaranya menjadi berbentuk tepung dan pengembangan aneka pangan lokal lainnya;
9. Penguatan pengawasan dan pembinaan keamanan pangan dengan kerjasama lintas sektor dan meningkatkan kelembagaan serta peran OKKPD Tingkat Kabupaten;
10. Penyediaan benih dan bibit unggul, pengendalian hama penyakit tanaman serta perbaikan kesuburan tanah;
11. Penyediaan alat mesin pertanian pra-panen dan pasca panen;
12. Peningkatan populasi dan kualitas bibit ternak melalui teknologi Inseminasi Buatan (IB) pada ternak serta penyediaan bibit ternak ruminansia dan unggas;
13. Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit hewan strategis dan zoonosis melalui pembangunan klinik hewan;
14. Peningkatan pengetahuan, sikap dan keterampilan pelaku utama serta pelaku usaha melalui pembentukan petani milenial dan santri tani milenial dengan melaksanakan pembinaan, pendidikan dan pelatihan, sekolah lapang, gelar inovasi serta kaji terap;
15. Pembentukan dan pengembangan manajemen pengelolaan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) melalui penyediaan sarana dan prasarana.

2.4. Reviu Terhadap Rancangan RKPD Perubahan

Dalam perumusan dokumen RKPD Perubahan akan mengadopsi dan mengekstraksi dari dokumen RPD Kabupaten Tangerang utamanya dalam rancangan kerangka ekonomi daerah, kebijakan keuangan daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan dalam rangka mewujudkan sinergitas dan sinkronisasi program dan kegiatan antara Pembangunan Nasional dengan Pembangunan Daerah, dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tangerang yaitu pada tujuan RPD Kabupaten Tangerang : Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia.

RKPD Perubahan Kabupaten Tangerang Tahun 2025 merupakan penjabaran Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru yang menyebabkan adanya perbedaan pendekatan perumusan tujuan dan sasaran karena tidak tersedianya visi dan misi Kepala Daerah.

Terkait hal tersebut, dengan mempedomani dokumen RPD, maka tujuan dan sasaran pada dokumen RKPD Perubahan harus diselaraskan dengan tujuan dan sasaran dokumen RPD yang telah disusun dengan memperhatikan pencapaian target dari sasaran-sasaran pada tahun 2024 dan tahun 2025. Review terhadap Rencana Kerja RKPD Perubahan Tahun 2025 terhadap hasil analisis kebutuhan Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tangerang dapat dilihat pada tabel 2.4 terlampir.

Tabel 2.4.

Review terhadap Rancangan RKPD Perubahan Tahun 2025

KODE	Rancangan Awal RKPD Perubahan 2025				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Target Indikator	RKPD PERUBAHAN 2025	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Target Indikator	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN			**72.954.000.652,00**	**DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN**			**72.954.000.652,00**	
2.09.02	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN**	**Persentase Lumbung Pangan yang Aktif**	**53,95 Persen**	**1.529.167.800,00**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN**	**Persentase Lumbung Pangan yang Aktif**	**53,95 Persen**	**1.529.167.800,00**	
2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Lumbung Pangan yang Aktif*	53.95 persen	1.529.167.800,00	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Lumbung Pangan yang Aktif*	53.95 persen	1.529.167.800,00	
2.09.02.2.01.0003	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	*Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia*	5 Unit	1.529.167.800,00	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	*Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia*	5 Unit	1.529.167.800,00	
2.09.03	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	**Persentase 12 Jenis Pangan Strategis yang Mengalami Kenaikan Harga < 5-10%** **Persentase Ketersediaan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP)** **Persentase Capaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)**	**100 persen** **23.03 persen** **85,5 persen**	**6.755.409.190,00**	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	**Persentase 12 Jenis Pangan Strategis yang Mengalami Kenaikan Harga < 5-10%** **Persentase Ketersediaan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP)** **Persentase Capaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)**	**100 persen** **23.03 persen** **85,5 persen**	**6.755.409.190,00**	
2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	*Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota Persentase 12 Jenis Pangan Strategis yang Mengalami Kenaikan Harga < 5-10%*	100 Persen	3.789.292.790,00	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	*Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota Persentase 12 Jenis Pangan Strategis yang Mengalami Kenaikan Harga < 5-10%*	100 Persen	3.789.292.790,00	
2.09.03.2.01.0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	*Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia*	1 Laporan	3.541.332.390,00	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	*Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia*	1 Laporan	3.541.332.390,00	

KODE	Rancangan Awal RKPD Perubahan 2025				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Target Indikator	RKPD PERUBAHAN 2025	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Target Indikator	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.09.03.2.01.0008	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	*Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota*	1 laporan	147.623.400,00	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	*Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota*	1 laporan	147.623.400,00	
2.09.03.2.01.0015	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	*Informasi Harga dan Pasokan Pangan*	1 Dokumen	39.947.000,00	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	*Informasi Harga dan Pasokan Pangan*	1 Dokumen	39.947.000,00	
2.09.03.2.01.0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	*Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)*	1 Dokumen	60.390.000,00	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	*Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)*	1 Dokumen	60.390.000,00	
2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	*Persentase Ketersediaan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP)*	100 persen	2.786.497.000,00	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	*Persentase Ketersediaan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP)*	100 persen	2.786.497.000,00	
2.09.03.2.02.0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	*Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota*	200 Ton	2.786.497.000,00	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	*Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota*	200 Ton	2.786.497.000,00	
2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	*Persentase Capaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)*	85.5 persen	179.619.400,00	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	*Persentase Capaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)*	85.5 persen	179.619.400,00	
2.09.03.2.04.0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	*Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun*	1 Dokumen	54.671.000,00	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	*Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun*	1 Dokumen	54.671.000,00	
2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	*Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal*	1 Laporan	124.948.400,00	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	*Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal*	1 Laporan	124.948.400,00	
2.09.04	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	**Peta Kerentanan dan Kerawanan Pangan (Food Security and Vulnerability Atlas/FSVA) Persentase Jumlah Desa Rentan Rawan Pangan yang Diintervensi**	**1 Dokumen 86.36 Persen**	**604.603.940,00**	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	**Peta Kerentanan dan Kerawanan Pangan (Food Security and Vulnerability Atlas/FSVA) Persentase Jumlah Desa Rentan Rawan Pangan yang Diintervensi**	**1 Dokumen 86.36 Persen**	**604.603.940,00**	
2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	*Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan*	1 dokumen	57.856.870,00	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	*Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan*	1 dokumen	57.856.870,00	

KODE	Rancangan Awal RKPD Perubahan 2025				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Target Indikator	RKPD PERUBAHAN 2025	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Target Indikator	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.09.04.2.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	*Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan*	1 Dokumen	57.856.870,00	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	*Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan*	1 Dokumen	57.856.870,00	
2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	*Persentase Desa Rentan Rawan Pangan yang Diintervensi*	86.36 persen	546.747.070,00	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	*Persentase Desa Rentan Rawan Pangan yang Diintervensi*	86.36 persen	546.747.070,00	
2.09.04.2.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota*	1 Dokumen	327.217.000,00	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota*	1 Dokumen	327.217.000,00	
2.09.04.2.02.0004	Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	*Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi*	1 Dokumen	219.530.070,00	Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	*Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi*	1 Dokumen	219.530.070,00	
2.09.05	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	**Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan Pangan**	**85 Persen**	**134.489.500,00**	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	**Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan Pangan**	**85 Persen**	**134.489.500,00**	
2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan Pangan*	85 persen	134.489.500,00	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan Pangan*	85 persen	134.489.500,00	
2.09.05.2.01.0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota*	1 Dokumen	21.919.900,00	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota*	1 Dokumen	21.919.900,00	
2.09.05.2.01.0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota*	1 Dokumen	102.712.600,00	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota*	1 Dokumen	102.712.600,00	

KODE	Rancangan Awal RKPD Perubahan 2025				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Target Indikator	RKPD PERUBAHAN 2025	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Target Indikator	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.09.05.2.01.0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	*Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan*	1 Dokumen	9.857.000,00	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	*Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan*	1 Dokumen	9.857.000,00	
3.27.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan**	**100 Persen**	**36.229.517.152,00**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan**	**100 Persen**	**36.229.517.152,00**	
3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan*	100 persen	147.349.000,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan*	100 persen	147.349.000,00	
3.27.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	8 Dokumen	130.149.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	8 Dokumen	130.149.000,00	
3.27.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	4 Laporan	17.200.000,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	4 Laporan	17.200.000,00	
3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	100 Persentase	31.834.764.566,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	100 Persentase	31.834.764.566,00	
3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	153 Orang/ bulan	31.834.764.566,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	153 Orang/ bulan	31.834.764.566,00	
3.27.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase Ketersediaan Dokumen Laporan Barang Milik Daerah*	100 Persentase	4.978.000,00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase Ketersediaan Dokumen Laporan Barang Milik Daerah*	100 Persentase	4.978.000,00	
3.27.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	*Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD*	1 Laporan	4.978.000,00	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	*Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD*	1 Laporan	4.978.000,00	
3.27.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Prosentase aparatur yang meningkat kapasitasnya*	100 Persentase	245.436.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Prosentase aparatur yang meningkat kapasitasnya*	100 Persentase	245.436.000,00	
3.27.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*	150 Orang	245.436.000,00	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*	150 Orang	245.436.000,00	

KODE	Rancangan Awal RKPD Perubahan 2025				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Target Indikator	RKPD PERUBAHAN 2025	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Target Indikator	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	100 Persentase	1.946.314.142,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	100 Persentase	1.946.314.142,00	
3.27.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	1 Paket	22.348.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	1 Paket	22.348.000,00	
3.27.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	1 Paket	1.033.220.042,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	1 Paket	1.033.220.042,00	
3.27.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*	1 Paket	41.456.500,00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*	1 Paket	41.456.500,00	
3.27.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	1 Paket	114.668.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	1 Paket	114.668.000,00	
3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	1 Paket	72.068.600,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	1 Paket	72.068.600,00	
3.27.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*	1 Dokumen	9.250.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*	1 Dokumen	9.250.000,00	
3.27.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	1 Laporan	151.318.000,00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	1 Laporan	151.318.000,00	
3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	1 Laporan	501.985.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	1 Laporan	501.985.000,00	
3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase pemenuhan Jasa Penunjang*	100 Persentase	175.892.000,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase pemenuhan Jasa Penunjang*	100 Persentase	175.892.000,00	
3.27.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan*	4 Unit	175.892.000,00	Pengadaan Mebel	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan*	4 Unit	175.892.000,00	
3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pemenuhan Jasa Penunjang*	100 Persentase	1.280.073.568,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pemenuhan Jasa Penunjang*	100 Persentase	1.280.073.568,00	
3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa*	1 Laporan	236.590.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa*	1 Laporan	236.590.000,00	

KODE	Rancangan Awal RKPD Perubahan 2025				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Target Indikator	RKPD PERUBAHAN 2025	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Target Indikator	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				*Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*			
3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	1 Laporan	1.043.483.568,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	1 Laporan	1.043.483.568,00	
3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah*	100 Persentase	594.709.876,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah*	100 Persentase	594.709.876,00	
3.27.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*	16 Unit	573.709.876,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*	16 Unit	573.709.876,00	
3.27.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	5 Unit	21.000.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	5 Unit	21.000.000,00	
3.27.02	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**Persentase Ketersediaan Sarana Pertanian**	**45 Persen**	**16.051.708.280,00**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**Persentase Ketersediaan Sarana Pertanian**	**45 Persen**	**16.051.708.280,00**	
3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	*Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian*	1 Laporan	8.880.646.600,00	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	*Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian*	1 Laporan	8.880.646.600,00	
3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	*Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi*	1 Laporan	341.029.000,00	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	*Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi*	1 Laporan	341.029.000,00	
3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	*Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian*	1 Laporan	8.375.241.000,00	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	*Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian*	1 Laporan	8.375.241.000,00	
3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota*	45.00 persen	6.264.467.900,00	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota*	45.00 persen	6.264.467.900,00	

KODE	Rancangan Awal RKPD Perubahan 2025				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Target Indikator	RKPD PERUBAHAN 2025	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Target Indikator	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.27.02.2.02.0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	*Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman*	1 Dokumen	521.675.800,00	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	*Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman*	1 Dokumen	521.675.800,00	
3.27.02.2.02.0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	*Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman*	1 Dokumen	3.497.565.000,00	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	*Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman*	1 Dokumen	3.497.565.000,00	
3.27.02.2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan*	1 Laporan	72.245.400,00	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan*	1 Laporan	72.245.400,00	
3.27.02.2.05.0006	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	*Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan*	1 Laporan	72.245.400,00	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	*Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan*	1 Laporan	72.245.400,00	
3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	*Jumlah Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain*	1 Laporan	437.039.150,00	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	*Jumlah Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain*	1 Laporan	437.039.150,00	
3.27.02.2.06.0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	*Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain*	307 Ekor	385.208.000,00	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	*Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain*	307 Ekor	385.208.000,00	
3.27.02.2.06.0004	Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	*Jumlah benih ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain*	3000 Dosis	51.831.150,00	Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	*Jumlah benih ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain*	3000 Dosis	51.831.150,00	
3.27.03	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**Persentase Ketersediaan Prasarana Pertanian**	**65 Persen**	**6.309.417.000,00**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**Persentase Ketersediaan Prasarana Pertanian**	**65 Persen**	**6.309.417.000,00**	
3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	*Jumlah Ketersediaan Prasarana Pertanian*	65 persen	6.309.417.000,00	Pengembangan Prasarana Pertanian	*Jumlah Ketersediaan Prasarana Pertanian*	65 persen	6.309.417.000,00	
3.27.03.2.01.0015	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	*Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola*	1 Dokumen	6.309.417.000,00	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	*Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola*	1 Dokumen	6.309.417.000,00	

KODE	Rancangan Awal RKPD Perubahan 2025				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Target Indikator	RKPD PERUBAHAN 2025	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Target Indikator	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.27.04	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**Persentase Penanganan Jumlah Penyakit Hewan yang ditangani**	**75 Persen**	**2.363.639.810,00**	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**Persentase Penanganan Jumlah Penyakit Hewan yang ditangani**	**75 Persen**	**2.363.639.810,00**	
3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam daerah Kabupaten/ Kota*	1 Laporan	1.683.630.334,00	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam daerah Kabupaten/ Kota*	1 Laporan	1.683.630.334,00	
3.27.04.2.01.0005	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	*Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan*	1 Wilayah	1.683.630.334,00	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	*Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan*	1 Wilayah	1.683.630.334,00	
3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	*Terlaksananya Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner*	1 Laporan	306.866.560,00	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	*Terlaksananya Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner*	1 Laporan	306.866.560,00	
3.27.04.2.04.0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	*Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan*	2 Laporan	306.866.560,00	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	*Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan*	2 Laporan	306.866.560,00	
3.27.07	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**Persentase SDM Penyuluh Pertanian dan Kelompok Tani yang Meningkat Kapasitasnya**	**70 Persen**	**2.976.047.980,00**	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**Persentase SDM Penyuluh Pertanian dan Kelompok Tani yang Meningkat Kapasitasnya**	**70 Persen**	**2.976.047.980,00**	
3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	*Persentase Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian dan Kelompok Tani*	70 persentase	2.976.047.980,00	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	*Persentase Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian dan Kelompok Tani*	70 persentase	2.976.047.980,00	
3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	*Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya*	8 Unit	719.022.600,00	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	*Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya*	8 Unit	719.022.600,00	
3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	*Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan*	300 Unit	1.088.838.400,00	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	*Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang*	300 Unit	1.088.838.400,00	

KODE	Rancangan Awal RKPD Perubahan 2025				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Target Indikator	RKPD PERUBAHAN 2025	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Target Indikator	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				*Ditingkatkan Kapasitasnya*			
3.27.07.2.01.0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	*Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi*	8 Unit	150.788.600,00	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	*Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi*	8 Unit	150.788.600,00	
3.27.07.2.01.0006	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	*Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya*	40 Orang	501.417.800,00	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	*Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya*	40 Orang	501.417.800,00	
	UPTD PRODUKSI BENIH TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN				**UPTD PRODUKSI BENIH TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN**				
3.27.02.2.01.0003	Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	*Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak*	8 Ton	164.376.600,00	Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	*Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak*	8 Ton	164.376.600,00	
3.27.02.2.02.0004	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman	*Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian*	1 Varietas Unggul Baru (VUB)	2.245.227.100,00	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman	*Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian*	1 Varietas Unggul Baru (VUB)	2.245.227.100,00	
	UPTD PEMBIBITAN TERNAK				**UPTD PEMBIBITAN TERNAK**				
3.27.02.2.03.0002	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	*Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar*	1 Laporan	397.309.230,00	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	*Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar*	1 Laporan	397.309.230,00	
	UPTD PENYULUHAN PERTANIAN				**UPTD PENYULUHAN PERTANIAN**				
3.27.07.2.01.0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	*Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian*	8 Unit	515.980.580,00	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	*Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian*	8 Unit	515.980.580,00	
	UPTD PUSKESWAN				**UPTD PUSKESWAN**				
3.27.04.2.03.0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	*Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner*	1 Laporan	373.142.916,00	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	*Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner*	1 Laporan	373.142.916,00	

Rincian program dan Perubahan Tahun 2025 sesuai dengan strategi dan arah kebijakan untuk pencapaian kinerja Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tangerang adalah sebagaimana tercantum dalam tabel 2.5 berikut :

Tabel 2.5. Program dan Kegiatan Perubahan Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan KabupatenTangerang Tahun 2025

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	MURNI 2025	PERUBAHAN 2025	SELISIH
1	2	3	4	5 = (4-3)
	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	**61.673.315.531**	**72.954.000.652**	**11.280.685.121**
2.09.02	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN**	**511.995.800**	**1.529.167.800**	**1.017.172.000**
2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	511.995.800	1.529.167.800	1.017.172.000
2.09.03	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	**2.862.432.300**	**6.755.409.190**	**3.892.976.890**
2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	2.386.634.900	3.789.292.790	1.402.657.890
2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	288.313.000	2.786.497.000	2.498.184.000
2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	187.484.400	179.619.400	-7.865.000
2.09.04	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	**623.680.130**	**604.603.940**	**-19.076.190**
2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	66.676.190	57.856.870	-8.819.320
2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	557.003.940	546.747.070	-10.256.870
2.09.05	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	**135.959.500**	**134.489.500**	**-1.470.000**
2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	135.959.500	134.489.500	-1.470.000
3.27.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**36.375.181.359**	**36.229.517.152**	**-145.664.207**
3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	158.599.000	147.349.000	-11.250.000
3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	31.604.922.373	31.834.764.566	229.842.193
3.27.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	10.167.000	4.978.000	-5.189.000
3.27.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	251.611.000	245.436.000	-6.175.000
3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.372.606.542	1.946.314.142	-426.292.400
3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	175.892.000	175.892.000	0
3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.206.673.568	1.280.073.568	73.400.000

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	MURNI 2025	PERUBAHAN 2025	SELISIH
1	2	3	4	5 = (4-3)
3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	594.709.876	594.709.876	0
3.27.02	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**8.646.669.370**	**16.051.708.280**	**7.405.038.910**
3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	1.383.395.210	8.880.646.600	7.497.251.390
3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	6.307.831.900	6.264.467.900	-43.364.000
3.27.02.2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	387.340.430,00	397.309.230,00	9.968.800
3.27.02.2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	124.983.500	72.245.400	-52.738.100
3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	443.118.330	437.039.150	-6.079.180
3.27.03	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**6.382.463.000**	**6.309.417.000**	**-73.046.000**
3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	6.382.463.000	6.309.417.000	-73.046.000
3.27.04	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**3.401.623.502**	**2.363.639.810**	**-1.037.983.692**
3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	949.215.334	1.683.630.334	734.415.000
3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	378.272.208,00	373.142.916,00	-5.129.292
3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	2.074.135.960	306.866.560	-1.767.269.400
3.27.07	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**2.733.310.570**	**2.976.047.980**	**242.737.410**
3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	2.733.310.570	2.976.047.980	242.737.410

Berdasarkan Hasil Analisis Kebutuhan Rumusan Program dan Kegiatan Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tangerang Tahun 2025 mengalami perubahan dari rancangan awal RKPD Tahun 2025. Pada Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tangerang Tahun 2025 mengusulkan pada Renja Perubahan 2025 pagu anggaran sebesar Rp. 72.954.000.652,- mengalami kenaikan anggaran sebesar Rp.11.280.685.121 yang berasal dari tambahan efesiensi sebesar Rp. 5.907.842.928,- dan RKPD Perubahan sebesar Rp.5.372.842.193 sehingga total pagu Renja Perubahan 2025 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan kabupaten Tangerang sebesar Rp. 72.954.000.652.

Rincian pagu anggaran pada Program dan Kegiatan murni, penjabaran efesiensi dan RKPD Perubahan dapat dilihat pada tabel berikut :

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Penanggung Jawab	Murni 2025	Penjabaran / Efesiensi	RKPD Perubahan 2025
2.09.02	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Bidang Ketahanan Pangan	511.995.800	1.254.727.800	1.529.167.800
2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur Dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Bidang Ketahanan Pangan	511.995.800	1.254.727.800	1.529.167.800
2.09.03	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Bidang Ketahanan Pangan	2.862.432.300	5.255.155.390	6.755.409.190
2.09.03.2.01	Penyediaan Dan Penyaluran Pangan Pokok Atau Pangan Lainnya Sesuai Dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Stabilisasi Pasokan Dan Harga Pangan	Bidang Ketahanan Pangan	2.386.634.900	2.289.038.990	3.789.292.790
2.09.03.2.02	Pengelolaan Dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Bidang Ketahanan Pangan	288.313.000	2.786.497.000	2.786.497.000
2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai Dengan Angka Kecukupan Gizi	Bidang Ketahanan Pangan	187.484.400	179.619.400	179.619.400
2.09.04	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Bidang Ketahanan Pangan	623.680.130	604.603.940	604.603.940
2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan Dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Bidang Ketahanan Pangan	66.676.190	57.856.870	57.856.870
2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Bidang Ketahanan Pangan	557.003.940	546.747.070	546.747.070
2.09.05	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Bidang Ketahanan Pangan	135.959.500	134.489.500	134.489.500
2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Bidang Ketahanan Pangan	135.959.500	134.489.500	134.489.500
3.27.02	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Bidang Sarana Pertanian	8.646.669.370	11.857.393.280	16.051.708.280
3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Bidang Sarana Pertanian	1.383.395.210	4.710.557.600	8.880.646.600
3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (Sdg) Hewan, Tumbuhan, Dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Bidang Sarana Pertanian	6.307.831.900	6.252.241.900	6.264.467.900

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Penanggung Jawab	Murni 2025	Penjabaran / Efesiensi	RKPD Perubahan 2025
3.27.02.2.03	Peningkatan Mutu Dan Peredaran Benih/Bibit Ternak Dan Tanaman Pakan Ternak Serta Pakan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	UPTD Pembibitan Ternak	387.340.430	385.309.230	397.309.230
3.27.02.2.05	Pengendalian Dan Pengawasan Penyediaan Dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, Dan Hijauan Pakan Ternak Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Bidang Sarana Pertanian	124.983.500	72.245.400	72.245.400
3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak Dan Hijauan Pakan Ternak Yang Sumbernya Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Bidang Sarana Pertanian	443.118.330	437.039.150	437.039.150
3.27.03	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Bidang Prasarana Pertanian	6.382.463.000	6.321.757.000	6.309.417.000
3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	Bidang Prasarana Pertanian	6.382.463.000	6.321.757.000	6.309.417.000
3.27.04	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Bidang Keswan Kesmavet	3.401.623.502	3.335.182.210	2.363.639.810
3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan Dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Bidang Keswan Kesmavet	949.215.334	933.630.334	1.683.630.334
3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium Dan Jasa Medik Veteriner Dalam Daerah Kabupaten/Kota	UPTD Puskeswan	378.272.208	373.142.916	373.142.916
3.27.04.2.04	Penerapan Dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Bidang Keswan Kesmavet	2.074.135.960	2.028.408.960	306.866.560
3.27.07	Program Penyuluhan Pertanian	Bidang Penyuluhan Pertanian	2.733.310.570	2.935.247.980	2.976.047.980
3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Bidang Penyuluhan Pertanian	2.733.310.570	2.935.247.980	2.976.047.980
3.27.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Sekretariat	36.375.181.359	35.882.601.359	36.229.517.152
3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat	158.599.000	147.349.000	147.349.000
3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Sekretariat	31.604.922.373	31.604.922.373	31.834.764.566
3.27.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Sekretariat	10.167.000	4.978.000	4.978.000

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Penanggung Jawab	Murni 2025	Penjabaran / Efesiensi	RKPD Perubahan 2025
3.27.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Sekretariat	251.611.000	245.436.000	245.436.000
3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Sekretariat	2.372.606.542	1.902.640.542	1.946.314.142
3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Sekretariat	175.892.000	175.892.000	175.892.000
3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sekretariat	1.206.673.568	1.206.673.568	1.280.073.568
3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sekretariat	594.709.876	594.709.876	594.709.876

Penambahan pagu anggaran digunakan untuk peningkatan produktivitas pertanian melalui intensifikasi dan mekanisasi pertanian, pengembangan desa mandiri pangan, serta penyediaan cadangan pangan masyarakat melalui pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) dalam rangka swasembada pangan dalam mendukung Asta Cita Presiden Republik Indonesia.

Untuk lebih rinci Rencana Kerja dan Pendanaan, yaitu program dan target kinerja program, kegiatan dan target kinerja kegiatan, serta anggaran dan indikatornya telah tercantum pada tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tangerang sebagaimana tercantum pada tabel T-C.33 sebagai berikut:

Tabel T-C.33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tangerang

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			TARGET 2025		KEBUTUHAN DANA			LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
			MURNI	PERUBAHAN	MURNI	PERUBAHAN	SELISIH					
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7-6)	9	10	11	12	13
	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN				**61.673.315.531**	**72.954.000.652**	**11.280.685.121**					**55.544.706.080**
2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Lumbung Pangan yang Aktif	53,95 Persen	53,95 Persen	511.995.800	1.529.167.800	1.017.172.000				64,47 persen	530.000.000
2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Lumbung Pangan yang Aktif*	53.95 persen	53.95 persen	511.995.800	1.529.167.800	1.017.172.000				64,47 persen	530.000.000
2.09.02.2.01.0003	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	*Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia*	2 Unit	5 Unit	511.995.800	1.529.167.800	1.017.172.000	Kab. Tangerang	APBD		15 Unit	530.000.000
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase 12 Jenis Pangan Strategis yang Mengalami Kenaikan Harga < 5-10% Persentase Ketersediaan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) Persentase Capaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	100 persen 23.03 persen 85,5 persen	100 persen 23.03 persen 85,5 persen	2.862.432.300	6.755.409.190	3.892.976.890				100 persen 23.03 persen 85,5 persen	2.780.000.000
2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	*Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota* *Persentase 12 Jenis Pangan Strategis yang Mengalami Kenaikan Harga < 5-10%*	100 Persen 100 persen	100 Persen 100 persen	2.386.634.900	3.789.292.790	1.402.657.890				100 Persen 100 persen	2.230.000.000

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			TARGET 2025		KEBUTUHAN DANA			LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
			MURNI	PERUBAHAN	MURNI	PERUBAHAN	SELISIH					
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7-6)	9	10	11	12	13
2.09.03.2.01.0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	*Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia*	1 Laporan	1 Laporan	2.090.000.000	3.541.332.390	1.451.332.390	Kab. Tangerang	APBD	Program Unggulan Desa Mandiri Pangan	1 Laporan	2.000.000.000
2.09.03.2.01.0008	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	*Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota*	1 laporan	1 laporan	153.819.000	147.623.400	-6.195.600	Kab. Tangerang	APBD		1 laporan	85.000.000
2.09.03.2.01.0015	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	*Informasi Harga dan Pasokan Pangan*	1 Dokumen	1 Dokumen	80.535.900	39.947.000	-40.588.900	Kab. Tangerang	APBD		1 Dokumen	80.000.000
2.09.03.2.01.0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	*Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)*	1 Dokumen	1 Dokumen	62.280.000	60.390.000	-1.890.000	Kab. Tangerang	APBD		13 Dokumen	65.000.000
2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	*Persentase Ketersediaan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP)*	23.03 persen	100 persen	288.313.000	2.786.497.000	2.498.184.000				100 persen	290.000.000
2.09.03.2.02.0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	*Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota*	20 Ton	200 Ton	288.313.000	2.786.497.000	2.498.184.000	Kab. Tangerang	APBD		80 Ton	290.000.000
2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	*Persentase Capaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)*	85.5 persen	85.5 persen	187.484.400	179.619.400	-7.865.000				86,00 persen	260.000.000
2.09.03.2.04.0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	*Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun*	1 Dokumen	1 Dokumen	56.568.000	54.671.000	-1.897.000	Kab. Tangerang	APBD		1 Dokumen	60.000.000
2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	*Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal*	1 Laporan	1 Laporan	130.916.400	124.948.400	-5.968.000	Kab. Tangerang	APBD		1 Laporan	200.000.000

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			TARGET 2025		KEBUTUHAN DANA			LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
			MURNI	PERUBAHAN	MURNI	PERUBAHAN	SELISIH					
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7-6)	9	10	11	12	13
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Peta Kerentanan dan Kerawanan Pangan (Food Security and Vulnerability Atlas/FSVA) Persentase Jumlah Desa Rentan Rawan Pangan yang Diintervensi	1 Dokumen 86.36 Persen	1 Dokumen 86.36 Persen	623.680.130	604.603.940	-19.076.190				1 Dokumen 86.36 Persen	500.000.000
2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	*Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan*	1 dokumen	1 dokumen	66.676.190	57.856.870	-8.819.320				1 Dokumen	150.000.000
2.09.04.2.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	*Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan*	1 Dokumen	1 Dokumen	66.676.190	57.856.870	-8.819.320	Kab. Tangerang	APBD		1 Dokumen	150.000.000
2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	*Persentase Desa Rentan Rawan Pangan yang Diintervensi*	86.36 persen	86.36 persen	557.003.940	546.747.070	-10.256.870				100 persen	350.000.000
2.09.04.2.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota*	1 Dokumen	1 Dokumen	334.127.000	327.217.000	-6.910.000	Kab. Tangerang	APBD		1 Dokumen	285.000.000
2.09.04.2.02.0004	Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	*Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi*	1 Dokumen	1 Dokumen	222.876.940	219.530.070	-3.346.870	Kab. Tangerang	APBD		1 Dokumen	65.000.000
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan Pangan	85 Persen	85 Persen	135.959.500	134.489.500	-1.470.000				90 persen	190.000.000
2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan Pangan*	85 persen	85 persen	135.959.500	134.489.500	-1.470.000				90 persen	190.000.000

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			TARGET 2025		KEBUTUHAN DANA			LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
			MURNI	PERUBAHAN	MURNI	PERUBAHAN	SELISIH					
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7-6)	9	10	11	12	13
2.09.05.2.01.0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota*	1 Dokumen	1 Dokumen	21.919.900	21.919.900	0	Kab. Tangerang	APBD		1 Dokumen	50.000.000
2.09.05.2.01.0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota*	1 Dokumen	1 Dokumen	102.801.600	102.712.600	-89.000	Kab. Tangerang	APBD		1 Dokumen	100.000.000
2.09.05.2.01.0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	*Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan*	1 Dokumen	1 Dokumen	11.238.000	9.857.000	-1.381.000	Kab. Tangerang	APBD		1 Dokumen	40.000.000
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	100 Persen	100 Persen	36.375.181.359	36.229.517.152	-145.664.207				100 persen	35.434.205.130
3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan*	100 persen	100 persen	158.599.000	147.349.000	-11.250.000				100 persen	70.000.000
3.27.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	1 Dokumen	8 Dokumen	130.149.000	130.149.000	0	Kab. Tangerang	APBD		1 Dokumen	50.000.000
3.27.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	1 Laporan	4 Laporan	28.450.000	17.200.000	-11.250.000	Kab. Tangerang	APBD		1 Laporan	20.000.000
3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	100 Persentase	100 Persentase	31.604.922.373	31.834.764.566	229.842.193				100 persen	31.649.856.530
3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	181 Orang/ bulan	153 Orang/ bulan	31.604.922.373	31.834.764.566	229.842.193	Kab. Tangerang	APBD		149 Orang	31.649.856.530
3.27.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase Ketersediaan Dokumen Laporan Barang Milik Daerah*	100 Persentase	100 Persentase	10.167.000	4.978.000	-5.189.000				100 persen	10.000.000

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			TARGET 2025		KEBUTUHAN DANA			LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
			MURNI	PERUBAHAN	MURNI	PERUBAHAN	SELISIH					
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7-6)	9	10	11	12	13
3.27.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	*Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD*	1 Laporan	1 Laporan	10.167.000	4.978.000	-5.189.000	Kab. Tangerang	APBD		1 Laporan	10.000.000
3.27.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Prosentase aparatur yang meningkat kapasitasnya*	100 Persentase	100 Persentase	251.611.000	245.436.000	-6.175.000				100 persen	500.000.000
3.27.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*	150 Orang	150 Orang	251.611.000	245.436.000	-6.175.000	Kab. Tangerang	APBD		180 Orang	500.000.000
3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	100 Persentase	100 Persentase	2.372.606.542	1.946.314.142	-426.292.400				100 persen	1.344.348.600
3.27.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	1 Paket	1 Paket	22.348.000	22.348.000	0	Kab. Tangerang	APBD		1 Paket	10.000.000
3.27.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	1 Paket	1 Paket	1.001.886.442	1.033.220.042	31.333.600	Kab. Tangerang	APBD		1 Paket	404.348.600
3.27.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*	1 Paket	1 Paket	41.456.500	41.456.500	0	Kab. Tangerang	APBD		1 Paket	30.000.000
3.27.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	1 Paket	1 Paket	114.668.000	114.668.000	0	Kab. Tangerang	APBD		1 Paket	100.000.000
3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	1 Paket	1 Paket	99.672.600	72.068.600	-27.604.000	Kab. Tangerang	APBD		1 Paket	50.000.000
3.27.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*	1 Dokumen	1 Dokumen	9.250.000	9.250.000	0	Kab. Tangerang	APBD		1 Dokumen	10.000.000
3.27.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	1 Laporan	1 Laporan	212.200.000	151.318.000	-60.882.000	Kab. Tangerang	APBD		1 Laporan	170.000.000

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			TARGET 2025		KEBUTUHAN DANA			LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
			MURNI	PERUBAHAN	MURNI	PERUBAHAN	SELISIH					
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7-6)	9	10	11	12	13
3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	1 Laporan	1 Laporan	871.125.000	501.985.000	-369.140.000	Kab. Tangerang	APBD		1 Laporan	570.000.000
3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase pemenuhan Jasa Penunjang*	100 Persentase	100 Persentase	175.892.000	175.892.000	0				100 persen	200.000.000
3.27.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan*	4 Unit	4 Unit	175.892.000	175.892.000	0	Kab. Tangerang	APBD		1 Unit	200.000.000
3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pemenuhan Jasa Penunjang*	100 Persentase	100 Persentase	1.206.673.568	1.280.073.568	73.400.000				100 persen	1.045.000.000
3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	1 Laporan	1 Laporan	236.590.000	236.590.000	0	Kab. Tangerang	APBD		1 Laporan	230.000.000
3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	1 Laporan	1 Laporan	970.083.568	1.043.483.568	73.400.000	Kab. Tangerang	APBD		1 Laporan	815.000.000
3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah*	100 Persentase	100 Persentase	594.709.876	594.709.876	0				100 persen	615.000.000
3.27.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*	16 Unit	16 Unit	573.709.876	573.709.876	0	Kab. Tangerang	APBD		16 Unit	600.000.000
3.27.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	5 Unit	5 Unit	21.000.000	21.000.000	0	Kab. Tangerang	APBD		3 Unit	15.000.000
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Ketersediaan Sarana Pertanian	45 Persen	45 Persen	8.646.669.370	16.051.708.280	7.405.038.910				60 persen	4.428.399.750

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			TARGET 2025		KEBUTUHAN DANA			LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
			MURNI	PERUBAHAN	MURNI	PERUBAHAN	SELISIH					
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7-6)	9	10	11	12	13
3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	*Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian*	1 Laporan	1 Laporan	1.383.395.210	8.880.646.600	7.497.251.390				1 Laporan	2.210.000.000
3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	*Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi*	1 Laporan	1 Laporan	388.916.000	341.029.000	-47.887.000	Kab. Tangerang	APBD		1 Laporan	905.000.000
3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	*Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian*	1 Laporan	1 Laporan	836.821.000	8.375.241.000	7.538.420.000	Kab. Tangerang	APBD		1 Laporan	1.080.000.000
3.27.02.2.01.0003	Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	*Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak*	1 Ton	8 Ton	157.658.210	164.376.600	6.718.390	Kab. Tangerang	APBD	UPTD Benih	8 Ton	225.000.000
3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota*	45.00 persen	45.00 persen	6.307.831.900	6.264.467.900	-43.364.000				60 persen	1.260.000.000
3.27.02.2.02.0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	*Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman*	1 Dokumen	1 Dokumen	534.976.800	521.675.800	-13.301.000	Kab. Tangerang	APBD		1 Dokumen	760.000.000
3.27.02.2.02.0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	*Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman*	1 Dokumen	1 Dokumen	3.508.250.000	3.497.565.000	-10.685.000	Kab. Tangerang	APBD		1 Dokumen	275.000.000
3.27.02.2.02.0004	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman	*Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian*	1 Varietas Unggul Baru (VUB)	1 Varietas Unggul Baru (VUB)	2.264.605.100	2.245.227.100	-19.378.000	Kab. Tangerang	APBD	UPTD Benih	1 Varietas Unggul Baru (VUB)	225.000.000
3.27.02.2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota*	1 Kegiatan	1 Kegiatan	387.340.430	397.309.230	9.968.800				1 Kegiatan	383.399.750

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			TARGET 2025		KEBUTUHAN DANA			LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
			MURNI	PERUBAHAN	MURNI	PERUBAHAN	SELISIH					
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7-6)	9	10	11	12	13
3.27.02.2.03.0002	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	*Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar*	1 Laporan	1 Laporan	387.340.430	397.309.230	9.968.800	Kab. Tangerang	APBD		1 Laporan	383.399.750
3.27.02.2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan*	1 Laporan	1 Laporan	124.983.500	72.245.400	-52.738.100				1 Laporan	125.000.000
3.27.02.2.05.0006	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	*Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan*	1 Laporan	1 Laporan	124.983.500	72.245.400	-52.738.100	Kab. Tangerang	APBD	UPTD Bitnak	1 Laporan	125.000.000
3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	*Jumlah Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain*	1 Laporan	1 Laporan	443.118.330	437.039.150	-6.079.180				1 Laporan	450.000.000
3.27.02.2.06.0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	*Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain*	48 Ekor	307 Ekor	391.118.700	385.208.000	-5.910.700	Kab. Tangerang	APBD		307 Ekor	350.000.000
3.27.02.2.06.0004	Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	*Jumlah benih ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain*	20 Dosis	3000 Dosis	51.999.630	51.831.150	-168.480	Kab. Tangerang	APBD		3000 Dosis	100.000.000
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Ketersediaan Prasarana Pertanian	65 Persen	65 Persen	6.382.463.000	6.309.417.000	-73.046.000				75 persen	6.882.101.200
3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	*Jumlah Ketersediaan Prasarana Pertanian*	65 persen	65 persen	6.382.463.000	6.309.417.000	-73.046.000				75 persen	6.882.101.200

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			TARGET 2025		KEBUTUHAN DANA			LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
			MURNI	PERUBAHAN	MURNI	PERUBAHAN	SELISIH					
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7-6)	9	10	11	12	13
3.27.03.2.01.0015	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	*Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola*	1 Dokumen	1 Dokumen	6.382.463.000	6.309.417.000	-73.046.000	Kab. Tangerang	APBD		1 Dokumen	6.882.101.200
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Penanganan Jumlah Penyakit Hewan yang ditangani	75 Persen	75 Persen	3.401.623.502	2.363.639.810	-1.037.983.692				80 persen	1.950.000.000
3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam daerah Kabupaten/ Kota*	1 Laporan	1 Laporan	949.215.334	1.683.630.334	734.415.000				1 Laporan	1.069.422.000
3.27.04.2.01.0005	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	*Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan*	1 Wilayah	1 Wilayah	949.215.334	1.683.630.334	734.415.000	Kab. Tangerang	APBD		1 Wilayah	1.069.422.000
3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Pelayanan Jasa Medik Veteriner*	1000 ekor	1000 ekor	378.272.208	373.142.916	-5.129.292					450.000.000
3.27.04.2.03.0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	*Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner*	1 Laporan	1 Laporan	378.272.208	373.142.916	-5.129.292	Kab. Tangerang	APBD	UPTD Puskeswan	1 Laporan	450.000.000
3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	*Terlaksananya Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner*	1 Laporan	1 Laporan	2.074.135.960	306.866.560	-1.767.269.400				1 Laporan	430.578.000
3.27.04.2.04.0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	*Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan*	2 Laporan	2 Laporan	2.074.135.960	306.866.560	-1.767.269.400	Kab. Tangerang	APBD		2 Laporan	430.578.000

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			TARGET 2025		KEBUTUHAN DANA			LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
			MURNI	PERUBAHAN	MURNI	PERUBAHAN	SELISIH					
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7-6)	9	10	11	12	13
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase SDM Penyuluh Pertanian dan Kelompok Tani yang Meningkat Kapasitasnya	70 Persen	70 Persen	2.733.310.570	2.976.047.980	242.737.410				80 persen	2.850.000.000
3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	*Persentase Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian dan Kelompok Tani*	70 persentase	70 persentase	2.733.310.570	2.976.047.980	242.737.410				80 persen	2.850.000.000
3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	*Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya*	8 Unit	8 Unit	755.082.600	719.022.600	-36.060.000	Kab. Tangerang	APBD		8 Unit	600.000.000
3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	*Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya*	300 Unit	300 Unit	1.191.071.070	1.088.838.400	-102.232.670	Kab. Tangerang	APBD		426 Unit	950.000.000
3.27.07.2.01.0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	*Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian*	10 Unit	8 Unit	476.180.000	515.980.580	39.800.580	Kab. Tangerang	APBD	UPTD Penyuluhan Pertanian	8 Unit	800.000.000
3.27.07.2.01.0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	*Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi*	8 Unit	8 Unit	150.788.600	150.788.600	0	Kab. Tangerang	APBD		8 Unit	150.000.000
3.27.07.2.01.0006	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	*Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya*	40 Orang	40 Orang	160.188.300	501.417.800	341.229.500	Kab. Tangerang	-APBD -DAK NON FISIK		40 Orang	350.000.000

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tangerang merupakan salah satu perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pertanian dan ketahanan pangan sehingga Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan hanya melakukan tugas koordinatif sesuai dengan kewenangannya dibidang pertanian dan ketahanan pangan yaitu membantu Bupati dalam memberikan pelayanan pertanian dan ketahanan pangan yang ada di Wilayah Kabupaten Tangerang dan membuat kebijakan terkait dengan pertanian dan ketahanan pangan serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pertanian dan ketahanan pangan.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja (RENJA) merupakan acuan setiap perangkat daerah (PD) dalam mengoperasionalkan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi. Dengan rencana kerja yang terukur dan didukung oleh pendanaan, maka menjadi suatu instrumen dan indikator yang digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah.

Memperhatikan perkembangan hasil evaluasi capaian kinerja pelaksanaan renja tahun 2025 sampai dengan triwulan I dan untuk mengakomodir beberapa kebijakan maka dianggap perlu melakukan pergeseran dan atau perubahan terhadap keluaran sub kegiatan, target kinerja serta penambahan dan atau pengurangan terhadap anggaran yang dibutuhkan.

Dalam rangka mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tangerang, serta untuk melaksanakan strategi dan kebijakan melalui beberapa program dan kegiatan. Adapun Program dan Kegiatan beserta anggaran yang diusulkan di perubahan tahun 2025 adalah pada tabel berikut:

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN YANG DIUSULKAN			Keterangan
		MURNI 2025	PERUBAHAN 2025	SELISIH	
1	2	3	4	5 = (4-3)	6
	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	**61.673.315.531**	**72.954.000.652**	**11.280.685.121**	
2.09.02	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN**	**511.995.800**	**1.529.167.800**	**1.017.172.000**	
2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	511.995.800	1.529.167.800	1.017.172.000	
2.09.02.2.01.0003	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	511.995.800	1.529.167.800	1.017.172.000	
2.09.03	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	**2.862.432.300**	**6.755.409.190**	**3.892.976.890**	
2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	2.386.634.900	3.789.292.790	1.402.657.890	
2.09.03.2.01.0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	2.090.000.000	3.541.332.390	1.451.332.390	
2.09.03.2.01.0008	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	153.819.000	147.623.400	-6.195.600	
2.09.03.2.01.0015	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	80.535.900	39.947.000	-40.588.900	
2.09.03.2.01.0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	62.280.000	60.390.000	-1.890.000	
2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	288.313.000	2.786.497.000	2.498.184.000	
2.09.03.2.02.0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	288.313.000	2.786.497.000	2.498.184.000	

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN YANG DIUSULKAN			Keterangan
		MURNI 2025	PERUBAHAN 2025	SELISIH	
1	2	3	4	5 = (4-3)	6
2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	187.484.400	179.619.400	-7.865.000	
2.09.03.2.04.0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	56.568.000	54.671.000	-1.897.000	
2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	130.916.400	124.948.400	-5.968.000	
2.09.04	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	**623.680.130**	**604.603.940**	**-19.076.190**	
2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	66.676.190	57.856.870	-8.819.320	
2.09.04.2.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	66.676.190	57.856.870	-8.819.320	
2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	557.003.940	546.747.070	-10.256.870	
2.09.04.2.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	334.127.000	327.217.000	-6.910.000	
2.09.04.2.02.0004	Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	222.876.940	219.530.070	-3.346.870	
2.09.05	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	**135.959.500**	**134.489.500**	**-1.470.000**	
2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	135.959.500	134.489.500	-1.470.000	
2.09.05.2.01.0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	21.919.900	21.919.900	0	
2.09.05.2.01.0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	102.801.600	102.712.600	-89.000	
2.09.05.2.01.0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	11.238.000	9.857.000	-1.381.000	
3.27.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**36.375.181.359**	**36.229.517.152**	**-145.664.207**	
3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	158.599.000	147.349.000	-11.250.000	
3.27.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	130.149.000	130.149.000	0	
3.27.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28.450.000	17.200.000	-11.250.000	
3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	31.604.922.373	31.834.764.566	229.842.193	
3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	31.604.922.373	31.834.764.566	229.842.193	
3.27.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	10.167.000	4.978.000	-5.189.000	
3.27.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	10.167.000	4.978.000	-5.189.000	
3.27.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	251.611.000	245.436.000	-6.175.000	
3.27.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	251.611.000	245.436.000	-6.175.000	
3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.372.606.542	1.946.314.142	-426.292.400	
3.27.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	22.348.000	22.348.000	0	
3.27.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.001.886.442	1.033.220.042	31.333.600	

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN YANG DIUSULKAN			Keterangan
		MURNI 2025	PERUBAHAN 2025	SELISIH	
1	2	3	4	5 = (4-3)	6
3.27.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	41.456.500	41.456.500	0	
3.27.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	114.668.000	114.668.000	0	
3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	99.672.600	72.068.600	-27.604.000	
3.27.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9.250.000	9.250.000	0	
3.27.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	212.200.000	151.318.000	-60.882.000	
3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	871.125.000	501.985.000	-369.140.000	
3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	175.892.000	175.892.000	0	
3.27.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	175.892.000	175.892.000	0	
3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.206.673.568	1.280.073.568	73.400.000	
3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	236.590.000	236.590.000	0	
3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	970.083.568	1.043.483.568	73.400.000	
3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	594.709.876	594.709.876	0	
3.27.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	573.709.876	573.709.876	0	
3.27.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21.000.000	21.000.000	0	
3.27.02	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**8.646.669.370**	**16.051.708.280**	**7.405.038.910**	
3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	1.383.395.210	8.880.646.600	7.497.251.390	
3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	388.916.000	341.029.000	-47.887.000	
3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	836.821.000	8.375.241.000	7.538.420.000	
3.27.02.2.01.0003	Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	157.658.210,00	164.376.600,00	6.718.390	
3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	6.307.831.900	6.264.467.900	-43.364.000	
3.27.02.2.02.0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	534.976.800	521.675.800	-13.301.000	
3.27.02.2.02.0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	3.508.250.000	3.497.565.000	-10.685.000	
3.27.02.2.02.0004	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman	2.264.605.100,00	2.245.227.100,00	-19.378.000	
3.27.02.2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	387.340.430,00	397.309.230,00	9.968.800	
3.27.02.2.03.0002	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	387.340.430,00	397.309.230,00	9.968.800	
3.27.02.2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	124.983.500	72.245.400	-52.738.100	
3.27.02.2.05.0006	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	124.983.500	72.245.400	-52.738.100	
3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1	443.118.330	437.039.150	-6.079.180	

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN YANG DIUSULKAN			Keterangan
		MURNI 2025	PERUBAHAN 2025	SELISIH	
1	2	3	4	5 = (4-3)	6
	(Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain				
3.27.02.2.06.0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	391.118.700	385.208.000	-5.910.700	
3.27.02.2.06.0004	Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	51.999.630	51.831.150	-168.480	
3.27.03	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**6.382.463.000**	**6.309.417.000**	**-73.046.000**	
3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	6.382.463.000	6.309.417.000	-73.046.000	
3.27.03.2.01.0015	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	6.382.463.000	6.309.417.000	-73.046.000	
3.27.04	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**3.401.623.502**	**2.363.639.810**	**-1.037.983.692**	
3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	949.215.334	1.683.630.334	734.415.000	
3.27.04.2.01.0005	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	949.215.334	1.683.630.334	734.415.000	
3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	378.272.208,00	373.142.916,00	-5.129.292	
3.27.04.2.03.0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	378.272.208,00	373.142.916,00	-5.129.292	
3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	2.074.135.960	306.866.560	-1.767.269.400	
3.27.04.2.04.0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	2.074.135.960	306.866.560	-1.767.269.400	
3.27.07	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**2.733.310.570**	**2.976.047.980**	**242.737.410**	
3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	2.733.310.570	2.976.047.980	242.737.410	
3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	719.022.600	719.022.600	0	
3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	1.088.838.400	1.088.838.400	0	
3.27.07.2.01.0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	475.180.580,00	515.980.580,00	40.800.000	
3.27.07.2.01.0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	150.788.600	150.788.600	0	
3.27.07.2.01.0006	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	501.417.800	501.417.800	0	

BAB IV
PENUTUP

Keberhasilan pembangunan pertanian dan ketahanan pangan tidak semata-mata ditentukan oleh hasil kerja keras sektor pertanian dan ketahanan pangan, tetapi sangat dipengaruhi oleh hasil kerja serta kontribusi positif berbagai sektor pembangunan lainnya. Sebagai uraian penutup dari Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tangerang Tahun 2025 dapat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Penyusunan Rencana Kerja Perubahan SKPD yang pada hakekatnya merupakan rencana capaian kinerja tahunan ini disusun dengan memperhatikan program dan kegiatan dalam Renstra Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tangerang serta mengacu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagaimana Nota Kesepakatan antara Bupati Tangerang dengan Pimpinan DPRD Kabupaten Tangerang tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2025 serta Prioritas dan APBD-P Tahun Anggaran 2025.
2. Sesuai dengan RPD Kabupaten Tangerang dan Rencana Strategis Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tangerang Tahun 2024 – 2026 maka ditetapkan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 serta kebijakan / strategi untuk mengerahkan segala potensi dan mengurangi keterbatasan / kendala yang ada dalam mencapai tujuan RPD Kabupaten Tangerang.
3. Bahwa Program dan Kegiatan yang tertuang pada Renja Perubahan Tahun 2025 ini dititikberatkan pada upaya peningkatan ekonomi daerah sektor unggulan dan meningkatnya ketahanan pangan dengan strategi Meningkatkan ketahanan pangan, Meningkatkan jumlah cadangan pangan, Pencapaian skor pola pangan harapan (PPH) yang terus meningkat, Meningkatnya produksi pertanian, serta Meningkatkan penyelenggaran *Good Governance* dengan pengembangan dan penerapan system pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur, dan sesuai peraturan.
4. Sesuai dengan Renja Perubahan Tahun 2025, terdapat penambahan PAGU sebesar Rp11.280.685.121 yang berasal dari tambahan efesiensi sebesar Rp. 5.907.842.928,- dan RKPD Perubahan sebesar Rp.5.372.842.193 yang akan digunakan untuk peningkatan produktivitas pertanian melalui intensifikasi dan mekanisasi pertanian, pengembangan desa mandiri pangan, serta penyediaan cadangan pangan masyarakat melalui pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) dalam rangka swasembada pangan.

Demikian Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tangerang Tahun 2025 ini semoga dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang.

30. Dinas Perindustrian dan Perdagangan

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan tahunan, sebagai implementasi dari tahapan rencana strategis Perangkat Daerah. Rencana Kerja pada dasarnya merupakan kumpulan dari kegiatan wajib pilihan dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, untuk periode satu tahun anggaran yang disusun mengacu kepada hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya, yang dikomparasi dengan tahapan Rencana Strategis dan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan serta berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tangerang sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan ditetapkan sebagai salah satu Dinas di Kabupaten Tangerang. Operasionalisasi pelaksanaan dari tugas pokok dan wewenangnya yang secara teknis diatur dalam Peraturan Bupati Tangerang Nomor 16 Tahun 2023 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Mengacu kepada Peraturan Bupati tersebut, Disperindag Kabupaten Tangerang mempunyai tugas pokok "Melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Perindustrian dan Perdagangan sesuai dengan kewenangan dan kebijakan Pemerintah Daerah".

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Pembangunan Jangka Menengah bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tangerang merupakan suatu penjabaran dari Visi dan Misi serta Program dari Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah, dan berisikan informasi mengenai sumberdaya yang diperlukan, keluaran dan manfaat. Keluaran dan Manfaat dalam Renja Perubahan ini merupakan indikator yang ingin dicapai namun tidaklah bersifat kaku, sehingga masih dapat diperbaiki dengan memperhatikan dinamika masyarakat dan RPD Pemerintah Kabupaten Tangerang.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari

Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten;
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
8. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
9. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
10. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
11. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
12. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
13. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan
14. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perangkat Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5.1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Memteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Klasifikasi, kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan di

Kabupaten Tangerang;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2005-2025;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang;
23. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 16 Tahun 2023 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
24. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Perencanaan dan Kebijakan Penganggaran Daerah;
25. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 39 Tahun 2024 tentang Rencana pembangunan Daerah Tahun 2025-2026

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2024, dimaksudkan untuk menyiapkan dokumen perencanaan tahunan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, sebagai implementasi dari pentahapan rencana strategis OPD yang memuat tentang kumpulan kegiatan wajib pilihan dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi untuk periode satu tahun anggaran.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah :

1. Menyediakan satu tolak ukur untuk Mengevaluasi Kinerja Tahunan Pemerintah Daerah.
2. Menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, dan sub kegiatan serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah.
3. Memudahkan penilaian hasil Program dan kegiatan yang telah dilakukan dan untuk mengetahui keberhasilan yang dicapai.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika/susunan penyajian dokumen rancangan Renja OPD menguraikan pokok bahasan, serta susunan garis besar berisikan :

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN
- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun Berkenaan
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
- 3.1 Rencana Kerja Perubahan

3.2 Pendanaan Perangkat Daerah
BAB IV PENUTUP
LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sampai Dengan Triwulan I Tahun Berkenaan

Sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa setiap dokumen Perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Evaluasi Rencana Kerja Perubahan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tangerang mencakup 3 (tiga) hal yaitu :

1. Realisasi program dan kegiatan yang belum memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program dan kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program dan kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perubahan Daerah Sampai Dengan Triwulan I dan Capaian Rencana Strategis Rencana Kerja Perubahan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tangerang adalah penjabaran rencana kerja tahunan yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tangerang sebagai pelaksana urusan perindustrian dan perdagangan.

Anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tangerang pada Tahun 2025 yang bersumber dari APBD Tahun 2025 setelah hasil analisa kebutuhan sebesar Rp. 22.480.956.755,- dengan capaian realisasi keuangan sampai dengan triwulan I Tahun 2025 sebesar Rp. 5.657.272.356,- (25,16%).

Berikut Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tangerang sampai dengan triwulan I Tahun 2025 (tahun berjalan):

Tabel 2. 1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Capaian (%)	Realisasi Fisik Kegiatan (%)	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Satuan	Target indikator	Realisasi Indikator	Capaian (%)
1	2	3	4	5=(4/3)*100	6	7	8	9	10	11=(10/9)*100
3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**									
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	39.552.000	0	0.00 %	0.00 %	Prosentase jumlah fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan	%	0	0	0.00 %
3.30.03.2.02	Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	39.552.000	0	0.00 %	0.00 %	Jumlah dokumen fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan	Dokumen	0	0	0.00 %
3.30.03.2.02.0001	*Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan*	39.552.000	0	0.00 %	0.00 %	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Dokumen	0	0	0.00 %
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	1.785.062.000	556.318.140	31.17 %	17.36 %	Prosentase harga barang kebutuhan pokok dan barang penting yang disubsidi yang dimonitor/dipantau	%	72.22	72.22	100.00 %
3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	1.785.062.000	556.318.140	31.17 %	17.36 %	Jumlah dokumen pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0.00 %
3.30.04.2.02.0001	*Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1(Satu) Kabupaten/Kota*	58.512.000	1.460.000	2.50 %	2.50 %	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Laporan	0	0	0.00 %
3.30.04.2.02.0003	*Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1(satu) Kabupaten/Kota*	1.726.550.000	554.858.140	32.14 %	32.22 %	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1(Satu) Kabupaten/Kota	Laporan	0	0	0.00 %
3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	808.985.467	84.007.000	10.38 %	5.88 %	Prosentase Meningkatnya Pelaku Usaha yang siap melakukan Ekspor	%	0	0	0.00 %
3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota	808.985.467	84.007.000	10.38 %	5.88 %	Jumlah dokumen pelaku usaha yang siap melakukan ekspor	Dokumen	0	0	0.00 %
3.30.05.2.01.0002	*Pameran Dagang Nasional*	770.002.000	84.007.000	10.91 %	11.75 %	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	Pelaku Usaha	0	0	0.00 %
3.30.05.2.01.0004	*Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan*	38.983.467	0	0.00 %	0.00 %	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	Pelaku Usaha	0	0	0.00 %
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	727.830.280	228.417.000	31.38 %	17.89 %	Persentase Pelaku Usaha yang mendapatkan pelayanan tera/tera ulang UTTP	%	23.81	47.76	200.59 %
3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	727.830.280	228.417.000	31.38 %	17.89 %	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera/Tera Ulang dan Pengawasan	Dokumen	0	0	0.00 %
3.30.06.2.01.0001	*Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang*	609.705.250	216.927.000	35.58 %	37.21 %	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	Unit	268750	268750	100.00 %
3.30.06.2.01.0002	*Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal*	90.306.960	10.060.000	11.14 %	11.21 %	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Pelaku Usaha	68	68	100.00 %
3.30.06.2.01.0003	*Penyidikan Metrologi Legal*	27.818.070	1.430.000	5.14 %	5.25 %	Jumlah Unit Hasil Penyidikan Metrologi Legal	Unit	0	-	0.00 %
3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	289.224.400	0	0.00 %	0.00 %	Prosentase jumlah produk IKM yang difasilitasi promosi penggunaan Produk Dalam Negeri	%	0	0	0.00 %
3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	289.224.400	0	0.00 %	0.00 %	Jumlah dokumen Pelaksanaan Promosi Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Dokumen	0	0	0.00 %
3.30.07.2.01.0001	*Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota*	289.224.400	0	0.00 %	0.00 %	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	UMKM	0	0	0.00 %
3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**									
3.31.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	16.475.863.458	4.361.574.076	26.47 %	35.39 %	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	%	25	25	100.00 %
3.31.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	233.302.800	10.554.000	4.52 %	34.53 %	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	1	1	100.00 %
3.31.01.2.01.0001	*Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	134.393.400	4.830.000	3.59 %	3.60 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	3	100.00 %
3.31.01.2.01.0006	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	5.770.000	5.724.000	99.20 %	100.00 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	1	100.00 %
3.31.01.2.01.0007	*Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	93.139.400	0	0.00 %	0.00 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	2	2	100.00 %

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Capaian (%)	Realisasi Fisik Kegiatan (%)	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Satuan	Target indikator	Realisasi Indikator	Capaian (%)
1	2	3	4	5=(4/3)*100	6	7	8	9	10	11=(10/9)*100
3.31.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.513.375.770	3.292.812.416	26.31 %	30.14 %	Jumlah dokumen administrasi keuangan	Dokumen	1	1	100.00 %
3.31.01.2.02.0001	*Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	12.501.735.770	3.289.315.416	26.31 %	28.26 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	55	43	78.18 %
3.31.01.2.02.0007	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD*	11.640.000	3.497.000	30.04 %	32.01 %	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	0	0	0.00 %
3.31.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	5.772.450	0	0.00 %	0.00 %	Jumlah dokumen Barang Milik Daerah	Dokumen	0	0	0.00 %
3.31.01.2.03.0006	*Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD*	5.772.450	0	0.00 %	0.00 %	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	0	0	0.00 %
3.31.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	55.768.000	40.250.000	72.17 %	72.70 %	Jumlah dokumen pembinaan pegawai	Dokumen	1	1	100.00 %
3.31.01.2.05.0002	*Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya*	55.768.000	40.250.000	72.17 %	72.70 %	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	1	100.00 %
3.31.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	773.462.200	241.448.500	31.22 %	44.43 %	Jumlah dokumen administrasi umum perangkat daerah	Dokumen	6	6	100.00 %
3.31.01.2.06.0001	*Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*	19.387.600	19.170.000	98.88 %	100.00 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	4	100.00 %
3.31.01.2.06.0002	*Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	23.997.500	0	0.00 %	0.00 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	0	0	0.00 %
3.31.01.2.06.0003	*Penyediaan Peralatan Rumah Tangga*	35.344.400	34.462.500	97.50 %	100.00 %	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	1	100.00 %
3.31.01.2.06.0004	*Penyediaan Bahan Logistik Kantor*	111.110.200	108.345.000	97.51 %	100.00 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100.00 %
3.31.01.2.06.0005	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	58.825.500	0	0.00 %	0.00 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	0	0	0.00 %
3.31.01.2.06.0006	*Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan*	167.700.000	30.176.000	17.99 %	23.71 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	1	100.00 %
3.31.01.2.06.0008	*Fasilitasi Kunjungan Tamu*	80.929.000	14.100.000	17.42 %	18.47 %	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	2	2	100.00 %
3.31.01.2.06.0009	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	276.168.000	35.195.000	12.74 %	13.26 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	1	100.00 %
3.31.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	356.110.000	153.000.000	42.96 %	51.00 %	Jumlah dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dokumen	2	1	50.00 %
3.31.01.2.07.0005	*Pengadaan Mebel*	164.259.200	153.000.000	93.15 %	100.00 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	1	1	100.00 %
3.31.01.2.07.0006	*Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	191.850.800	0	0.00 %	2.00 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	2	0	0.00 %
3.31.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.793.500.784	476.996.663	26.60 %	26.47 %	Jumlah dokumen jasa penunjang	Dokumen	3	3	100.00 %
3.31.01.2.08.0002	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	278.156.000	54.514.163	19.60 %	25.00 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	3	3	100.00 %
3.31.01.2.08.0004	*Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	1.515.344.784	422.482.500	27.88 %	27.93 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	3	3	100.00 %
3.31.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	744.571.454	146.512.497	19.68 %	16.73 %	Jumlah dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	3	3	100.00 %
3.31.01.2.09.0001	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan*	81.031.313	20.733.159	25.59 %	26.46 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	2	2	100.00 %
3.31.01.2.09.0002	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	519.274.108	116.684.338	22.47 %	25.46 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	17	17	100.00 %
3.31.01.2.09.0006	*Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	91.895.000	9.095.000	9.90 %	15.00 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	10	8	80.00 %
3.31.01.2.09.0009	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*	52.371.033	0	0.00 %	0.00 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	0	0.00 %

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Capaian (%)	Realisasi Fisik Kegiatan (%)	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Satuan	Target indikator	Realisasi Indikator	Capaian (%)
1	2	3	4	5=(4/3)*100	6	7	8	9	10	11=(10/9)*100
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	940.960.950	191.114.640	20.31 %	11.69 %	Persentase Peningkatan Jumlah IKM	%	0	0	0.00 %
3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	940.960.950	191.114.640	20.31 %	11.69 %	Jumlah Dokumen Jumlah IKM	Dokumen	0	0	0.00 %
3.31.02.2.01.0001	*Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota*	45.070.000	0	0.00 %	0.00 %	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	Dokumen	0	0	0.00 %
3.31.02.2.01.0002	*Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri*	112.006.000	0	0.00 %	0.00 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Dokumen	0	0	0.00 %
3.31.02.2.01.0003	*Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri*	158.051.975	0	0.00 %	0.00 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Dokumen	0	0	0.00 %
3.31.02.2.01.0004	*Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri*	201.668.975	44.610.000	22.12 %	22.49 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Dokumen	0	0	0.00 %
3.31.02.2.01.0005	*Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat*	309.556.000	146.504.640	47.33 %	47.65 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dokumen	0	0	0.00 %
3.31.02.2.01.0006	*Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri*	114.608.000	0	0.00 %	0.00 %	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Dokumen	0	0	0.00 %
3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	132.370.600	6.000.000	4.53 %	3.47 %	Prosentase Pelaku Usaha yang memiliki izin/legalitas yang diawasi	%	8	8.01	100.13 %
3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	132.370.600	6.000.000	4.53 %	3.47 %	Jumlah Dokumen Pelaku Usaha yang diawasi	Dokumen	0	0	0.00 %
3.31.03.2.01.0003	*Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota*	45.850.600	0	0.00 %	0.00 %	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	Dokumen	0	0	0.00 %
3.31.03.2.01.0004	*Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online*	86.520.000	6.000.000	6.93 %	6.93 %	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	Dokumen	0	0	0.00 %
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	1.281.107.600	229.841.500	17.94 %	14.13 %	Prosentase data industri dan data kawasan industri yang dilakukan pengolahan, analisis, dan publikasi/diseminasi	%	4.40	4.37	99.32 %
3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	1.281.107.600	229.841.500	17.94 %	14.13 %	Jumlah Dokumen Industri Hasil Analisa	Dokumen	0	0	0.00 %
3.31.04.2.01.0001	*Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)*	171.080.000	36.000.000	21.04 %	24.03 %	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Dokumen	0	0	0.00 %
3.31.04.2.01.0002	*Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas*	1.063.835.200	193.841.500	18.22 %	18.36 %	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Dokumen	0	0	0.00 %
3.31.04.2.01.0003	*Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas*	46.192.400	0	0.00 %	0.00 %	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Dokumen	0	0	0.00 %

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam menganalisis kinerja pelayanan yang diselenggarakan oleh suatu organisasi, tentunya organisasi tersebut memerlukan suatu ukuran yang dijadikan tolak ugur guna mengukur tangkat capaian kinerja. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tangerang sebagai penyelenggara pelayanan dalam bidang perindustrian dan perdagangan telah memiliki tolak ukur yang jelas digunakan dalam mengukur tingkat capaian kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tangerang , Ukuran yang digunakan adalah indikator program yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tangerang.

Tugas Pokok Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tangerang adalah Membantu Bupati merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan urusan pilihan pemerintahan bidang Perindustrian dan Perdagangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang perindustrian, perdagangan dan metrologi Legal;
2. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang perindustrian, perdagangan dan metrologi Legal;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perindustrian, perdagangan dan metrologi Legal;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Penataan kelembagaan dan organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tangerang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 16 tanggal 3 Februari tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang sebagai berikut :

1. Kepala;
2. Sekretariat, terdiri atas:
   a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
   b. Sub Bagian Keuangan; dan
   c. Kelompok Jabatan Fungsional
3. Bidang Pembangunan Sumberdaya Industri terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
4. Bidang Perdagangan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
5. Bidang Kemetrologian terdiri dari atas Kelompok Jabatan Fungsional.
6. Bidang Sarana dan Prasarana Industri terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tangerang sampai dengan triwulan I Tahun 2025 (tahun berjalan) sesuai dengan tabel berikut :

Tabel 2. 2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tangerang

No	Indikator	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi s.d Triwulan 1	Target	Realisasi
1	Prosentase jumlah fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan	80	80	90	0	100	-
2	Prosentase harga barang kebutuhan pokok dan barang penting yang disubsidi yang dimonitor/ dipantau	50	50	75	72.22	100	-
3	Prosentase Meningkatnya Pelaku Usaha yang siap melakukan Ekspor	62.27	62.27	65.93	0	69.60	-
4	Persentase Pelaku Usaha yang mendapatkan pelayanan tera/tera ulang UTTP	88.44	172.38	95.24	47.76	100	-
5	Prosentase jumlah produk IKM yang difasilitasi promosi penggunaan Produk Dalam Negeri	27	27	30	0	33	-
6	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	100	100	100	25	100	-
7	Persentase Peningkatan Jumlah IKM	20.17	29.74	28.72	0	37.26	-
8	Prosentase Pelaku Usaha yang memiliki izin/legalitas yang diawasi	24.95	24.95	25.05	8.01	25.05	-
9	Prosentase data industri dan data kawasan industri yang dilakukan pengolahan, analisis, dan publikasi/diseminasi	24.95	24.95	25.05	4.37	25.05	-

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tangerang periode RPD Tahun 2024-2026 sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam pembinaan dan pengembangan Perindustrian dan Perdagangan. Dalam menentukan isu strategis Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tangerang dilakukan dengan menggunakan metode analisis SWOT. Analisis SWOT merupakan bagian dari proses perencanaan yang digunakan untuk mengevaluasi faktor-faktor yang menjadi kekuatan (Strenght) dan kelemahan (Weakness) yang berasal dari dalam organisasi (ranah internal), serta peluang (Opportunity) dan ancaman (Threat) yang berasal dari luar organisasi (ranah eksternal). Hasil analisis SWOT Dinas Perindustrian dan Perdagangan dapat digambarkan antara lain, sebagai berikut:

2.3.1 Kekuatan dan Kelemahan (Strength and Weakness)

Faktor internal yang menjadikan hal tersebut kekuatan (strength) pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tangerang berdasarkan kondisi ril yang ada adalah sebagai berikut:

1. Adanya komitmen dari Pemerintah Daerah tentang Pelayanan perdagangan, pengawasan, dan pengendalian, dan metrologi legal;
2. Motivasi dan disiplin petugas penera;
3. Adanya kemitraan pelaku IKM dengan pelaku usaha besar,

Sedangkan faktor internal yang menjadi kelemahan (weakness) pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tangerang berdasarkan kondisi ril yang ada adalah sebagai berikut:

1. Masih kurangnya petugas penera berstatus PNS;
2. Kuota PNS untuk penera masih rendah;
3. Banyaknya pelaku IKM yang belum memiliki legalitas;
4. Rendahnya pelaku IKM yang melaksanakan ekspor;
5. Banyaknya pelaku usaha industri dan perdagangan yang belum memahami tertib ukur;
6. Terbatasnya sarana dan prasarana UTTP;

2.3.2 Peluang dan Ancaman (Opportunity and Threat)

Analisa lingkungan eksternal pada dasarnya merupakan identifikasi terhadap lingkungan luar (faktor eksternal) organisasi yang menguraikan peluang dan ancaman yang dapat berasal dari kelembagaan lain yang sejenis, sumber daya manusia, keuangan dan teknologi, peraturan-peraturan dan kebijakan, kondisi ekonomi daerah, sosial, politik dan keamanan. Peluang (opportunity) bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah sebagai berikut:

1. Adanya regulasi tentang Perindustrian dan Perdagangan standar pelayanan, dan SOP;
2. Adanya dukungan/komitmen Pemerintah Daerah pemangku kepentingan untuk bidang perindustrian dan perdagangan baik terhadap anggaran maupun regulasi.

Sedangkan faktor-faktor ancaman (threats) bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah sebagai berikut:

1. Akses terhadap pelayanan tera/tera ulang masih rendah;
2. Jumlah dan jenis tenaga/petugas penera masih terbatas;
3. Sarana dan prasarana terbatas.

Berdasarkan hasil analisis situasi dan identifikasi masalah Perindustrian dan Perdagangan yang ada di Kabupaten Tangerang bahwa kompleknya permasalahan perindustrian dan perdagangan yang dihadapi dalam perumusan rencana strategis ini. Keberhasilan pembangunan perindustrian dan pengembangan usaha perdagangan dalam meningkatkan Ekonomi Daerah sangat tergantung dari komitmen berbagai pihak tidak hanya dari gagasan / aparatur Dinas Perindustrian dan Perdagangan saja dalam meningkatkan pelayanan bidang perdagangan, pengawasan dan pengendalian, serta pelayanan metrologi legal tetapi komitmen harus dibangun mulai dari Pimpinan Daerah, DPRD, seluruh sektor Pemerintah yang terkait Lembaga Swadaya Masyarakat, ditambah masyarakat dengan kalangan swasta yang ada di Kabupaten, Kecamatan, Desa atau Kelurahan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka yang menjadi isu-isu strategis adalah sebagai berikut :

1. Penyediaan sumber daya manusia penera, penyuluh industri, petugas pengawasan, pengelola dokumen SKA dan pemilah arsip SKA yang berkualitas belum optimal;
2. Belum optimalnya sarana prasarana alat UTTP;
3. Belum optimalnya potensi UTTP yang wajib tera/ tera ulang bagi para pelaku usaha;
4. Belum termanfaatkannya teknologi informasi secara maksimal;
5. Rendahnya pengawasan sektor perindustrian dan perdagangan;
6. Masih rendahnya legalitas/ standarisasi dan produk pelaku IKM;
7. Belum optimalnya kemitraan IKM dengan industri besar;
8. Belum optimalnya pendampingan bagi para IKM selama pemasaran produk secara online;
9. Belum optimalnya pembinaan kepada para pelaku Industri dan Perdagangan tentang tertib ukur (tera/ tera ulang).

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Rencana Kerja Perubahan

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah pasal 27 ayat (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD ayat (2) Rancangan Renja OPD disusun dengan mengacu kepada rancangan awal RKPD, Renstra OPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Dalam upaya mencapai misi Pemerintah Kabupaten Tangerang, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tangerang tahun 2024 maka dengan adanya program-program dan kegiatan-kegiatan diharapkan dapat menyelesaikan berbagai isu-isu penting yang menjadi permasalahan-permasalahan yang dihadapi khususnya isu-isu strategis yang selama ini dihadapi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tangerang dalam mendukung dan mendorong pencapaian target sasaran kinerja Pemerintah Kabupaten Tangerang. Program-program/ Kegiatan-kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tangerang yang di rencanakan untuk periode 2024-2026. Pada periode Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 terdapat tambahan kegiatan mengikat yang diberikan kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tangerang oleh para pemangku kepentingan Kabupaten Tanerang dalam Rangka Akhir Periode RPD Tahun 2024-2026. Kegiatan tersebut harus dilaksanakan setelah periode rencana perubahan selesai yang direncanakanan pada triwulan III dan IV. Kegiatan yang dimaksud antara lain :

1. Optimalisasi Gerai Tangerang Gemilang (GTG) untuk DEKRANASDA;
2. Pelaksanaan Operasi Pasar (Warung Tekan Inflasi);
3. Penyesuaian Gaji ASN (PNS dan PPPL) dan Non PNS;

3.2. Pendanaan Perangkat Daerah

Kegiatan penyelenggaraan Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten Tangerang di tujukan untuk mewujudkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang maju serta memiliki daya saing menuju masyarakat Kabupaten Tangerang sejahtera, implementasi pelayanan perindustrian dan perdagangan, perlu adanya dukungan pendanaan untuk peningkatan daya saing produk pelaku IKM dan pelaku usaha perdagangan serta kualitas kinerja aparatur.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tangerang mendapatkan alokasi anggaran pada APBD Murni Tahun 2025 sebesar Rp. 22.480.956.755,- sedangkan pada RKPD Perubahan Tahun 2025 alokasi anggaran bertambah sebesar Rp. 1.281.823.930,- sehingga rencana alokasi anggaran pada Rencana Kerja Perubahan APBD-P menjadi sebesar Rp. 23.762.780.685,- Penambahan alokasi anggaran pada periode perubahan diperuntukkan untuk kegiatan :

1. Pelaksanaan Kegiatan “Optimalisasi GTG” peruntukan

DESKRANASDA;

2. Penyesuaian Pagu Anggaran Gaji dan Tunjangan ASN (PNS,CPNS dan PPPK);
3. Penambahan Gaji Ke-13 dan Gaji Ke-14 untuk Pegawai Non ASN;
4. Pengalihan pagu anggaran antar sub kegiatan.

Tabel 3. 1
Rincian Perubahan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Pagu Anggaran pada Rencana Kerja Perubahan Tahun Anggaran 2025

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KAB. TANGERANG
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	
		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN							
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							
	3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**				**3.073.886.050,00**	**2.949.172.680,00**	**3.440.917.147,00**	**491.744.467,00**
1,	**3.30.03**	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	**Prosentase jumlah fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan**	**90 Persen**	**90 Persen**	**64.657.500,00**	**45.120.000,00**	**39.552.000,00**	**-5.568.000,00**
	3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	*Jumlah Dokumen Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan*	1 Dokumen	1 Dokumen	64.657.500,00	45.120.000,00	39.552.000,00	-5.568.000,00
	3.30.03.2.02.0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan							
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1 Dokumen	1 Dokumen	64.657.500,00	45.120.000,00	39.552.000,00	-5.568.000,00
2,	**3.30.04**	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	**Prosentase harga barang kebutuhan pokok dan barang penting yang disubsidi yang dimonitor/ dipantau**	**75 Persen**	**75 Persen**	**962.793.000,00**	**962.692.000,00**	**1.726.550.000,00**	**763.858.000,00**
	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	*Jumlah dokumen pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota*	2 Dokumen	2 Dokumen	962.793.000,00	962.692.000,00	1.726.550.000,00	763.858.000,00
	3.30.04.2.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota							
			Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	62.793.000,00	62.692.000,00	58.512.000,00	-4.180.000,00
	3.30.04.2.02.0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota							
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	900.000.000,00	900.000.000,00	1.726.550.000,00	826.550.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	
3,	**3.30.05**	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	**Prosentase Meningkatnya Pelaku Usaha yang siap melakukan Ekspor**	**65.93 Persen**	**65.93 Persen**	**882.819.600,00**	**821.500.400,00**	**808.985.467,00**	**-12.514.933,00**
	3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah dokumen pelaku usaha yang siap melakukan ekspor*	4 Dokumen	4 Dokumen	882.819.600,00	821.500.400,00	808.985.467,00	-12.514.933,00
	3.30.05.2.01.0002	Pameran Dagang Nasional							
			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	50 Pelaku Usaha	50 Pelaku Usaha	829.081.800,00	776.234.000,00	770.002.000,00	-6.232.000,00
	3.30.05.2.01.0004	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan							
			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	60 Pelaku Usaha	60 Pelaku Usaha	53.737.800,00	45.266.400,00	38.983.467,00	-6.282.933,00
4,	**3.30.06**	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**Persentase Pelaku Usaha yang mendapatkan pelayanan tera/tera ulang UTTP**	**95,24 Persen**	**95,24 Persen**	**854.999.950,00**	**811.444.280,00**	**576.605.280,00**	**-234.839.000,00**
	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	*Jumlah Dokumen Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera/Tera Ulang dan Pengawasan*	2 Dokumen	2 Dokumen	854.999.950,00	811.444.280,00	576.605.280,00	-234.839.000,00
	3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang							
			Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	1075000 Unit	1075000 Unit	626.785.900,00	609.705.250,00	465.583.250,00	-144.122.000,00
	3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal							
			Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	275 Orang	275 Orang	150.082.100,00	133.001.960,00	90.286.960,00	-42.715.000,00
	3.30.06.2.01.0003	Penyidikan Metrologi Legal							
			Jumlah Unit Hasil Penyidikan Metrologi Legal	1 Unit	1 Unit	78.131.950,00	68.737.070,00	20.735.070,00	-48.002.000,00
5,	**3.30.07**	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	**Prosentase jumlah produk IKM yang difasilitasi promosi penggunaan Produk Dalam Negeri**	**30 Persen**	**30 Persen**	**308.616.000,00**	**308.416.000,00**	**289.224.400,00**	**-19.191.600,00**
	3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	*Jumlah dokumen Pelaksanaan Promosi Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri*	1 Dokumen	1 Dokumen	308.616.000,00	308.416.000,00	289.224.400,00	-19.391.600,00
	3.30.07.2.01.0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota							
			Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	100 UMKM	100 UMKM	308.616.000,00	308.416.000,00	289.224.400,00	-19.391.600,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	
	3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**							
1,	**3.31.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan**	**100 Persen**	**100 Persen**	**16.428.567.067,00**	**16.772.725.458,00**	**17.988.729.059,00**	**1.216.003.601,00**
	3.31.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	3 Dokumen	3 Dokumen	142.945.900,00	240.998.800,00	233.302.800,00	-7.696.000,00
	3.31.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	7 Dokumen	23.045.000,00	141.589.400,00	134.393.400,00	-7.196.000,00
	3.31.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	5.738.000,00	5.770.000,00	5.770.000,00	0,00
	3.31.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan	114.162.900,00	93.639.400,00	93.139.400,00	-500.000,00
	3.31.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen administrasi keuangan*	2 Dokumen	2 Dokumen	12.637.046.267,00	12.513.375.770,00	12.931.724.971,00	418.349.201,00
	3.31.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55 Orang/bulan	54 Orang/bulan	12.523.869.867,00	12.501.735.770,00	12.920.084.971,00	418.349.201,00
	3.31.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD							
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	2 Laporan	2 Laporan	113.176.400,00	11.640.000,00	11.640.000,00	0,00
	3.31.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen Barang Milik Daerah*	1 Dokumen	1 Dokumen	6.480.700,00	5.772.450,00	5.772.450,00	0,00
	3.31.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD							
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	6.480.700,00	5.772.450,00	5.772.450,00	0,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	
	3.31.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen pembinaan pegawai*	1 Dokumen	1 Dokumen	40.885.300,00	55.768.000,00	55.768.000,00	0,00
	3.31.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya							
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	40.885.300,00	55.768.000,00	55.768.000,00	0,00
	3.31.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen administrasi umum perangkat daerah Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah*	8 Dokumen 8 Jenis	8 Dokumen 8 Jenis	764.022.900,00	1.062.628.200,00	793.176.200,00	-269.452.000,00
	3.31.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	19.300.000,00	19.387.600,00	19.387.600,00	0,00
	3.31.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	19.775.100,00	23.997.500,00	23.997.500,00	0,00
	3.31.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	35.169.500,00	35.344.400,00	35.344.400,00	0,00
	3.31.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	135.646.800,00	111.110.200,00	111.110.200,00	0,00
	3.31.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	72.183.500,00	72.179.500,00	58.825.500,00	-13.354.000,00
	3.31.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan							
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	5 Dokumen	45.344.000,00	167.700.000,00	167.700.000,00	0,00
	3.31.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu							
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	11 Laporan	11 Laporan	79.950.000,00	80.929.000,00	80.929.000,00	0,00
	3.31.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	4 Laporan	356.654.000,00	551.980.000,00	295.882.000,00	-256.098.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	
	3.31.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	2 Dokumen	2 Dokumen	271.648.980,00	356.110.000,00	356.110.000,00	0,00
	3.31.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel							
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	118.127.100,00	164.259.200,00	164.259.200,00	0,00
	3.31.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	10 Unit	153.521.880,00	191.850.800,00	191.850.800,00	0,00
	3.31.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah dokumen jasa penunjang*	3 Dokumen	3 Dokumen	1.766.887.200,00	1.793.500.784,00	1.889.000.784,00	95.500.000,00
	3.31.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	264.387.200,00	278.156.000,00	278.156.000,00	0,00
	3.31.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	1.502.500.000,00	1.515.344.784,00	1.610.844.784,00	95.500.000,00
	3.31.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	4 Dokumen	4 Dokumen	798.649.820,00	744.571.454,00	1.723.873.854,00	979.302.400,00
	3.31.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	2 Unit	83.940.125,00	81.031.313,00	81.031.313,00	0,00
	3.31.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 Unit	17 Unit	571.591.820,00	519.274.108,00	519.274.108,00	0,00
	3.31.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	28 Unit	28 Unit	91.850.000,00	91.895.000,00	91.895.000,00	0,00
	3.31.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	51.267.875,00	52.371.033,00	1.031.673.433,00	979.302.400,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	
2,	**3.31.02**	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**Persentase Peningkatan Jumlah IKM**	**28.72 Persen**	**28.72 Persen**	**1.163.916.800,00**	**1.066.636.200,00**	**940.960.950,00**	**-125.675.250,00**
	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Jumlah IKM*	6 Dokumen	6 Dokumen	1.163.916.800,00	1.066.636.200,00	940.960.950,00	-125.675.250,00
	3.31.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota							
			Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	1 Dokumen	97.675.600,00	66.251.600,00	23.017.000,00	-43.234.600,00
	3.31.02.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri							
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	1 Dokumen	1 Dokumen	140.000.000,00	131.858.000,00	112.006.000,00	-19.852.000,00
	3.31.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri							
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 Dokumen	1 Dokumen	210.000.000,00	186.326.400,00	158.051.975,00	-28.274.425,00
	3.31.02.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri							
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 Dokumen	1 Dokumen	245.000.000,00	215.291.000,00	201.668.975,00	-13.622.025,00
	3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat							
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	241.579.200,00	342.167.200,00	351.642.000,00	9.474.800,00
	3.31.02.2.01.0006	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri							
			Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	1 Dokumen	229.662.000,00	124.742.000,00	94.575.000,00	-30.167.000,00
3,	**3.31.03**	**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI**	**Prosentase Pelaku Usaha yang memiliki izin/legalitas yang diawasi**	**25,05 Persen**	**25,05 Persen**	**2.257.499.950,00**	**1.831.689.400,00**	**1.065.686.800,00**	**-766.002.600,00**
	3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Pelaku Usaha yang diawasi*	1 Dokumen	1 Dokumen	316.679.000,00	242.894.400,00	115.190.600,00	-127.703.800,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	
	3.31.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota							
			-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	3 Dokumen	3 Dokumen	156.813.700,00	89.175.400,00	45.850.600,00	-43.324.800,00
	3.31.03.2.01.0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)							
			Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	3 Dokumen	3 Dokumen	159.865.300,00	153.719.000,00	69.340.000,00	-84.379.000,00
4,	**3.31.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**	**Prosentase data industri dan data kawasan industri yang dilakukan pengolahan, analisis, dan publikasi/diseminasi**	**25,05 Persen**	**25,05 Persen**	**1.940.820.950,00**	**1.588.795.000,00**	**950.496.200,00**	**-638.298.800,00**
	3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Industri Hasil Analisa*	1 Dokumen	1 Dokumen	1.940.820.950,00	1.588.795.000,00	950.496.200,00	-638.298.800,00
	3.31.04.2.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)							
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	4 Dokumen	4 Dokumen	170.156.200,00	231.785.000,00	171.080.000,00	-60.705.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	
	3.31.04.2.01.0002	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas							
			Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	3 Dokumen	3 Dokumen	1.655.599.750,00	1.266.402.600,00	733.223.800,00	-533.178.800,00
	3.31.04.2.01.0003	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas							
			Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	1 Dokumen	1 Dokumen	115.065.000,00	90.607.400,00	46.192.400,00	-44.415.000,00

BAB IV
PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan (RENJA Perubahan) Tahun 2025 menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud upaya dan tanggung jawab Pemerintah dalam mengakomodir berbagai kebutuhan Para Pelaku Usaha yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis masyarakat dalam menciptakan kebijakan yang memiliki keberpihakan pada masyarakat kecil dan pelaku usaha.

Output rencana kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tangerang adalah Program Tahunan yang sesuai dengan tugas pokok, fungsi, sasaran dan tujuan sehingga semua target bisa tercapai pada Periode RPD Tahun 2024-2026.

Rencana kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tangerang selain menjadi acuan resmi dan tolak ukur dari seluruh komponen Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam pelayanan kegiatan selama tahun 2025 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tangerang di masa yang akan datang.

Rencana kerja Perubahan (Renja Perubahan) juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tangerang. Rencana Kerja juga memberikan masukan yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dalam penyusunan rencana dimasa mendatang oleh unsur pimpinan dan seluruh pegawai sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa yang akan datang sehingga akan terwujud anggaran berbasis kinerja.

LAMPIRAN – LAMPIRAN

Tabel T-C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024
Kabupaten Tangerang

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)			Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023 (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3				4	5	6	7	8 =(7-6)	9	10	11 = (10/4)
3.31.02	**Program Perencanaan dan Pembangunan Industri**	**Capaian Program**	**:**	**Persentase Peningkatan Jumlah IKM**	**Persen**	**37.26%**	**57.29%**	**16.03%**	**123%**	**769%**	**20.17%**	**13.68%**	**36.70%**
3.31.02.2.01	**Kegiatan Penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri kabupaten/kota**	**Keluaran**	**:**	**Jumlah Dokumen Jumlah IKM**	**Dokumen**	**18**	**16**	**4**	**4**	**100%**	**6**	**3**	**16.67%**
3.31.02.2.01.0001	Sub Kegiatan Penyusunan rencana pembangunan industri kabupaten/kota	Keluaran	:	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	Dokumen	3	-	-	-	-	1	0	0
3.31.02.2.01.0002	Sub Kegiatan koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Keluaran	:	Jumlah industri menengah dan besar yang difasilitasi untuk menerapkan standarisasi industri hijau	pelaku industri	-	130	-	-	-	-	-	-
		Keluaran	:	Jumlah zona industri yang difasilitasi menjadi kawasan industri	zona industri	-	2	-	-	-	-	-	-
		Keluaran	:	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	dokumen	-	0	2	2	100%	-	-	-
		Keluaran	:	Jumlah Dokumen Hasil koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Dokumen	3	-	-	-		1	0	0
3.31.02.2.01.0003	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Keluaran	:	Jumlah Pelaku Industri yang meningkat kapasitas produksinya melalui Pendampingan/Pembinaan dan Pelatihan	Pelaku IKM	-	117	-	-	-	-	-	-
		Keluaran	:	Jumlah Sarana dan Prasarana Workshop dan Pelatihan	Item	-	-	-	-	-	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)			Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023 (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3				4	5	6	7	8 =(7-6)	9	10	11 = (10/4)
		Keluaran	:	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	dokumen	-	-	3	3	100.00%	-	-	-
		Keluaran	:	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Dokumen	3	-	-	-	-	1	1	100%
3.31.02.2.01.0004	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan, pembangunan sarana dan prasarana industri	Keluaran	:	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan, pembangunan sarana dan prasarana industri	Dokumen	3	-	-	-	-	1	0	0
3.31.02.2.01.0005	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Keluaran	:	Jumlah pelaku industri kecil yang mengalami peningkatan kapasitas produksinya melalui workshop dan pelatihan	pelaku IKM dan pabrikan	-	50	-	-	-	-	-	-
		Keluaran	:	Jumlah Peserta P2WKSS, PKK, dan Kampung KB yang mendapatkan pendampingan/pelatihan/ pembinaan untuk Menjadi Wirausaha Baru	pelaku wirausaha	-	215	-	-	-	-	-	-
		Keluaran	:	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	dokumen	3	-	2	2	100%	1	0	0
3.31.02.2.01.0006	Sub Kegiatan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Keluaran	:	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Dokumen	3	-	-	-	-	1	0	0
3.31.03	**Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota**	**Capaian Program**	**:**	**Prosentase Pelaku Usaha yang memiliki izin/legalitas yang diawasi**	**Persen**	**100%**	**88.69%**	**33.59%**	**41%**	**123%**	**24.95%**	**9.20%**	**9.20%**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)			Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023 (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3				4	5	6	7	8 =(7-6)	9	10	11 = (10/4)
3.31.03.2.01	**Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/kota**	**Keluaran**		**Jumlah Dokumen Pelaku Usaha yang diawasi**	**Dokumen**	**3**	**8**	**2**	**2**	**100.00%**	**1**	**0**	**0**
3.31.03.2.01.0003	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Keluaran	:	Jumlah Pelaku Usaha IKM yang diawasi legalitas, kemajuan/pengembangan dan pendampingan teknologi industri	pelaku IKM dan pabrikan	-	733	-	-	-	-	-	-
		Keluaran	:	Jumlah Pelaku Usaha IKM yang diikutsertakan dalam Gelar Pengawasan/Ekspose	pelaku IKM dan pabrikan	-	401	-	-	-	-	-	-
		Keluaran	:	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota	dokumen	-	-	3	3	100.00%	-	-	-
		Keluaran	:	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	Dokumen	9	-	-	-	-	3	1	33%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)			Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023 (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3				4	5	6	7	8 =(7-6)	9	10	11 = (10/4)
3.31.03.2.01.0004	Sub Kegiatan Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Keluaran	:	Jumlah pelaku industri yang difasilitasi pemenuhan komitmen melalui SIINAS	pelaku industri	-	30	-	-	-	-	-	-
		Keluaran	:	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS	dokumen	-	-	3	3	100%	-	-	-
		Keluaran	:	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	Dokumen	9	-	-	-	-	3	1	33%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)			Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023 (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3				4	5	6	7	8 =(7-6)	9	10	11 = (10/4)
3.31.04	**Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional**	**Capaian Program**		**Prosentase data industri dan data kawasan industri yang dilakukan pengolahan, analisis, dan publikasi/diseminasi**	**Persen**	**100%**	**25.02%**	**19.24%**	**19.24%**	**100.00%**	**24.95%**	**9.20%**	**9.20%**
3.31.04.2.01	**Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Keluaran**	**:**	**Jumlah Dokumen Industri Hasil Analisa**	**Dokumen**	**3**	**8**	**2**	**2**	**1**	**1**	**0**	**0**
3.31.04.2.01.0001	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Keluaran	:	Jumlah pelaku industri kecil yang dilakukan pendampingan teknologi industri	pelaku IKM		123	-	-	-	-	-	-
		Keluaran	:	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	dokumen		2	4	4	100%	-	-	-
		Keluaran	:	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Dokumen	12	-	-	-	-	4	1	25%
3.31.04.2.01.0002	Sub Kegiatan Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kab. Kota melalui SIINas	Keluaran	:	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	dokumen		2	3	3	1	-	-	-
		Keluaran	:	Jumlah Pelaksanaan desiminasi data industri dan data kawasan industri	kali		1	-	-	-	-	-	-
		Keluaran	:	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Dokumen	9	-	-	-	-	3	1	33%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)			Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023 (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3				4	5	6	7	8 =(7-6)	9	10	11 = (10/4)
3.31.04.2.01.0003	Sub Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Keluaran	:	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Dokumen	3	-	-	-	-	1	0	0
3.30.05	**Program Pengembangan Ekspor**	**Capaian Program**	**:**	**Prosentase Meningkatnya Pelaku Usaha yang siap melakukan Ekspor**	**Persen**	**69.60%**	**52.59%**	**16.97%**	**16.97%**	**100.00%**	**62.27%**	**7.33%**	**10.53%**
3.30.05.2.01	**Kegiatan Penyelengaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Keluaran**	**:**	**Jumlah dokumen pelaku usaha yang siap melakukan ekspor**	**Dokumen**	**12**	**12**	**3**	**3**	**1**	**4**	**0**	**0**
3.30.05.2.01.0002	Sub Kegiatan Pameran Dagang Nasional	Keluaran	:	Jumlah Pelaku Usaha yang di Fasilitasi Dalam Pameran Dagang	Pelaku Usaha	150	-	-	-	-	40	20	50%
3.30.05.2.01.0004	Sub Kegiatan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Keluaran	:	Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina	Pelaku Usaha	-	406	131	131	100%			
		Keluaran	:	Jumlah Pelaku Usaha/IKM yang Mengikuti Promosi melalui Pameran dan Misi Dagang	Pelaku Usaha	-	30	-	-	-			
		Keluaran	:	Jumlah Petugas Pengolah Data Dokumen	orang	-	20	-	-	-			
		Keluaran	:	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	Pelaku Usaha	180	-	-	-	-	50	0	0
3.30.07	**Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri**	**Capaian Program**	**:**	**Prosentase jumlah produk IKM yang difasilitasi promosi penggunaan Produk Dalam Negeri**	**Persen**	**33%**	-	-	-	-	**26.67%**	**6.67%**	**20.00%**
3.30.07.2.01	**Kegiatan Pelaksanaan Promosi Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**	**Keluaran**	**:**	**Jumlah dokumen Pelaksanaan Promosi Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**	**Dokumen**	**3**	-	-	-	-	**1**	**0**	**0**
3.30.07.2.01.0005	Sub Kegiatan Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Keluaran	:	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	UMKM	300	-	-	-	-	100	30	30%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)			Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023 (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3				4	5	6	7	8 =(7-6)	9	10	11 = (10/4)
3.30.03	**Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan**	**Capaian Program**	**:**	**Prosentase jumlah fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan**	**Persen**	**100%**	**42%**	**24%**	**24%**	**100%**	**80%**	**0**	**0**
3.30.03.2.02	**Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya**	**Keluaran**	**:**	**Jumlah dokumen fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan**	**Dokumen**	3	4	**1**	**1**	**100%**	**1**	**0**	**0**
3.30.03.2.02.0001	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi	Keluaran	:	Jumlah pasar yang dilakukan tera/tera ulang	pasar		21	-	-	-	-	-	-
		Keluaran	:	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Dokumen	3	-	3	3	100%	1	0	0
3.30.04	**Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting**	**Capaian Program**	**:**	**Prosentase harga barang kebutuhan pokok dan barang penting yang disubsidi yang dimonitor/ dipantau**	**Persen**	**100.00%**	**135.7%**	**35.71%**	**35.71%**	**100.00%**	**50.00%**	**50.00%**	**50%**
3.30.04.2.02	**Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota**	**Keluaran**	**:**	**Jumlah dokumen pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Dokumen**	**6**	**8**	**2**	**2**	**100%**	**2**	**0**	**0%**
3.30.04.2.02.0001	Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Keluaran	:	Jumlah Pangkalan LPG 3 Kg Bersubsidi yang dipantau/monitor dan dilakukan tera/tera ulang	pangkalan LPG 3 kg		1440	-	-	-	-	-	-
		Keluaran	:	Jumlah Bazaar/ Pasar Murah	Kali		3	-	-	-	-	-	-
\		Keluaran	:	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dala 1 (satu) Kabupaten/Kota	Laporan	**3**	**-**	2	2	100%	1	0	0
3.30.04.2.02.0003	Sub Kegiatan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Keluaran	:	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Laporan	**3**	**-**	**-**	**-**	**-**	1	0	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)			Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023 (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3				4	5	6	7	8 =(7-6)	9	10	11 = (10/4)
3.30.06	**Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen**	**Capaian Program**	**:**	**Persentase Pelaku Usaha yang mendapatkan pelayanan tera/tera ulang UTTP**	**Persen**	**100.00%**	**94.38%**	**11.68%**	**52%**	**440.78%**	**88.44%**	**83.67%**	**83.67%**
3.30.06.2.01	**Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera/Tera Ulang dan Pengawasan**	**Keluaran**	**:**	**Jumlah Dokumen Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera/Tera Ulang dan Pengawasan**	**Dokumen**	**6**	**8**	**2**	**2**	**100%**	**2**	**0**	**0**
3.30.06.2.01	Sub Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera/Tera Ulang	Keluaran	:	Jumlah Pelaku Usaha yang melaksanakan tera/tera ulang	Pelaku Usaha		1664	-	-	-	-	-	-
		Keluaran	:	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	Unit	1105053	4409109	496548	3103679	625%	1050000	1075276	102%
3.30.06.2.01	Sub Kegiatan Pengawasan / Penyuluhan Metrologi Legal	Keluaran	:	Jumlah Pelaku Usaha yang melaksanakan tera/tera ulang	Produk		457	-	-	-	-	-	-
		Keluaran	:	Jumlah Produk Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) yang akan diuji memenuhi standar kebenaran kuantitas, dan alat UTTP	Pelaku Usaha	**300**	977	206	210	101.94%	250	155	62%
3.30.06.2.01	Sub Kegiatan Penyidikan Metrologi Legal	Keluaran	:	Jumlah laporan tindak lanjut hasil pengawasan	laporan		1	-	-	-	-	-	-
		Keluaran	:	Jumlah unit hasil penyidikan metrologi legal	Unit	**3**	0	1	1	100%	1	0	0
3.31.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Capaian Program**	**:**	**Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan**	**Persen**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**50%**	**50.0%**
3.31.01.2.01	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Keluaran**	**:**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Dokumen**	**9**	**12**	**3**	**3**	**100%**	**3**	**1**	**33%**
3.31.01.2.01.0001	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Keluaran	:	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	**21**	28	7	7	100%	7	3	43%
3.31.01.2.01.0006	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Keluaran	:	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	**3**	4	1	1	100%	1	1	100%
3.31.01.2.01.0007	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Keluaran	:	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	9	12	3	3	100%	3	2	67%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)			Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023 (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3				4	5	6	7	8 =(7-6)	9	10	11 = (10/4)
3.31.01.2.02	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Keluaran**	**:**	**Jumlah dokumen administrasi keuangan**	**Dokumen**	**6**	**8**	**1**	**1**	**100%**	**2**	**1**	**50%**
3.31.01.2.02.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		:	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	**165**	102	50	45	90%	55	43	78%
3.31.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		:	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	6	8	2	2	100%	2	1	50%
3.31.01.2.03	**Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Keluaran**	**:**	**Jumlah dokumen Barang Milik Daerah**	**Dokumen**	**3**	**4**	**1**	**1**	**100%**	**1**	**1**	**100%**
3.31.01.2.03.0006	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Keluaran	:	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	3	4	1	1	100%	1	1	100%
3.31.01.2.05	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Keluaran**	**:**	**Jumlah Pegawai yang Difasilitasi**	**orang**	**-**	**165**	**55**	**50**	**91%**	**-**	**-**	**-**
		Keluaran	**:**	**Jumlah dokumen pembinaan pegawai**	**Dokumen**	**3**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1**	**1**	**100%**
3.31.01.2.05.0001	Sub Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Keluaran	:	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	165	32	50	50	100%	55	0	0%
3.31.01.2.05.0002	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Keluaran	:	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	110	52	-	-	-	55	43	78%
3.31.01.2.06	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Keluaran**	**:**	**Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**jenis**		**24**	**6**	**6**	**1**	**-**	**-**	**-**
		Keluaran	**:**	**Jumlah dokumen administrasi umum perangkat daerah**	**Dokumen**	**100%**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8**	**8**	**100%**
3.31.01.2.06.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Keluaran	:	Jumlah paket komponen instalasi/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12	-	-	-	-	4	4	100%
3.31.01.2.06.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Keluaran	:	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jenis		170	-	-	-			
		Keluaran	:	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	3	0	1	1	100%	1	1	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)			Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023 (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3				4	5	6	7	8 =(7-6)	9	10	11 = (10/4)
3.31.01.2.06.0003	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Keluaran	:	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	3	-	-	-	-	1	1	100%
3.31.01.2.06.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Keluaran	:	Tersedianya Alat Tulis Kantor	jenis		168	-	-	-			
		Keluaran	:	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	3	-	1	1	100%	1	1	100%
3.31.01.2.06.0005	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Keluaran	:	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	jenis		48	-	-	-			
		Keluaran	:	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	3	-	1	1	100%	1	1	100%
3.31.01.2.06.0006	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Keluaran	:	Tersedianya Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	jenis		12	-	-	-			
		Keluaran	:	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	15	-	1	1	100%	5	3	60%
3.31.01.2.06.0008	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Keluaran	:	Tersedianya makanan dan minuman rapat dan makan minum tamu	kali		240	-	-	-			
				Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	33	-	11	11	100%	11	5	45%
3.31.01.2.06.0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Keluaran	:	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	2000	500	500	100%	4	2	50%
3.31.01.2.07	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Keluaran**	**:**	**Tersedianya pengadaan barang milik daerah**	**jenis**		**2**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
				Jumlah dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Dokumen**	**100%**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2**	**2**	**100%**
3.31.01.2.07.0005	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Keluaran	:	Tersedianya mebelair	jenis		2	-	-	-			
		Keluaran	:	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	**5**	**-**	-	-	-	3	**3**	100%
3.31.01.2.07.0006	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Keluaran	:	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	38	-	-	-	-	18	18	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)			Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023 (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3				4	5	6	7	8 =(7-6)	9	10	11 = (10/4)
3.31.01.2.08	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Keluaran**	:	**Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**jenis**		17	**3**	**3**	**1**	**-**	**-**	**-**
				Jumlah dokumen jasa penunjang	**Dokumen**	**9**	-	**-**	**-**	**-**	**3**	**3**	**100%**
3.31.01.2.08.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Keluaran	:	Tersedianya petugas jasa surat menyurat	orang		4	-	-	-	-	-	-
		Keluaran	:	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	36	0	12	12	100%	12	6	50%
3.31.01.2.08.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Keluaran	:	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	jenis		8						
		Keluaran	:	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan	36	0	12	12	100%	12	6	50%
3.31.01.2.08.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Keluaran	:	Tersedianya Jasa Administrasi / Teknis Pendukung Perkantoran Non PNS dan jasa iklan/media cetak	Orang		4	-	-	-	-	-	-
				Tersedianya petugas kebersihan kantor	Orang		19	-	-	-	-	-	-
				Tersedianya petugas pengamanan kantor	Orang		17	-	-	-	-	-	-
		Keluaran	:	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	36	0	12	12	100%	12	6	50%
3.31.01.2.09	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Keluaran**	:	**Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**jenis**		**16**	**4**	**4**	**100%**	**-**	**-**	**-**
				Jumlah dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Dokumen**	**12**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4**	**4**	**100%**
3.31.01.2.09.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Keluaran	:	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	6	18	2	2	100%	2	2	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)			Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023 (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3				4	5	6	7	8 =(7-6)	9	10	11 = (10/4)
3.31.01.2.09.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Keluaran	:	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	51	62	17	17	100%	17	17	100%
3.31.01.2.09.0006	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Keluaran	:	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	84	36	32	32	100%	28	20	71%
3.31.01.2.09.0009	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Keluaran	:	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	3	3	1	1	100%	1	1	100%

31. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tangerang sebagai unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah.

Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja DPMPTSP Kabupaten Tangerang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Tangerang Nomor 35 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tangerang.

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tangerang Tahun 2024 merupakan turunan target kinerja yang akan dicapai per tahunnya yang berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026 yang sudah ditetapkan, upaya mencapai visi dan misi Kabupaten Tangerang yang sudah ditetapan pada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026.

Rencana Kerja Tahun Perubahan Tahun 2025 membahas evaluasi capaian kinerja tahun sebelumnya (Tahun 2024), target kinerja yang akan dicapai pada tahun berjalan (Tahun 2025) dan rencana target kinerja tahun berikutnya (Tahun 2026), agar dalam mentargetkan pencapaian per tahunnya sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan pada Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2007

tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 89 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;
21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Tangerang;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Daerah;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tangerang tahun 2005-2025;

27. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang Tahun 2011-2031;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang;
29. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 39 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026;
30. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 35 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tangerang;
31. Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tangerang Nomor 39 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2023 Nomor 39);
32. Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tangerang Nomor 46 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026;
33. Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tangerang Nomor 88 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
34. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 16 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
35. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 20 tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang;
36. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 05 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 adalah sebagai dokumen acuan dalam pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu untuk kurun waktu satu tahun (Tahun 2025) secara terencana, terarah, terpadu dan berkesinambungan agar tetap sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026 berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Murni Tahun 2025.

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Tersedianya pedoman yang dapat digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu pada tahun 2025;
2. Sebagai bahan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2025 sehingga indikator program dan kegiatan dapat tercapai.

3. Perubahan Rencana Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu disusun untuk mewujudkan sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan agar tetap selaras dengan Rencana Strategis Tahun 2024-2026 serta Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

Memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sampai dengan Triwulan II tahun berjalan sebagaimana tabel Evaluasi terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah pada tabel 2.4

BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, pergeseran output kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan. Rencana program dan kegiatan prioritas daerah tersebut mencakup semua Rencana program dan kegiatan prioritas yang akan dianggarkan melalui belanja langsung dan belanja tidak langsung sebagaimana tabel Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah tabel 3.1

BAB IV : PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Kinerja Sasaran

Pencapaian Kinerja Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tangerang Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Mengembangkan Laju pertumbuhan investasi yang diukur dengan indikator kinerja ”Persentase Laju Pertumbuhan Investasi”. Target Persentase Laju Pertumbuhan Investasi sebesar 5,12%, namun capaian indikator kinerja tidak mencapai target yaitu sebesar -11,51% yang diperoleh berdasarkan perhitungan nilai realisasi investasi tahun 2024 sebesar 26,3 triliun rupiah dikurangi dengan nilai realisasi investasi tahun 2023 sebesar 29,7 triliun rupiah dibagi nilai realisasi investasi tahun 2023 sebesar 29,7 triliun rupiah dikali 100%. Nilai realisasi investasi tahun 2024 untuk Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar 9,4 triliun rupiah dan nilai Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar 16,9 triliun rupiah. Adapun rasio capaian indikator 84,18% atau masuk kategori “Baik” diperoleh dengan perhitungan (100% + (-11,51%) (persentase capaian pertumbuhan laju investasi tahun 2024) / (100% + 5,12% (persentase target pertumbuhan laju investasi tahun 2024) x 100%. Tidak tercapainya target ini disebabkan karena adanya tahun politik Pemilu serentak di Indoneisa sehingga investor cenderung menahan terlebih dahulu investasinya. Sementara itu sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 dimana target yang ditetapkan sebesar 5,12% capaian yang diraih dengan memperbandingkan pada triwulan yang sama (QoQ) yaitu sebesar 54,46%, karena nilai realisasi investasi sampai Triwulan I tahun 2025 sebesar Rp. 8,48 Triliun sementara pada periode yang sama pada tahun 2024 mencapai Rp. 5,49 Triliun.

Gambar 2.1
Perhitungan Rasio Capaian
Indikator Kinerja Laju pertumbuhan investasi

Rasio Capaian (%)	= [100% + Realisasi (%)] / [100% + Target (%)] x 100%
	= [100% + (-11,51%)] / [100% + 5,12%] x 100%
	= 88,49% / 105,12% x 100%
	= 84,18%

2. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan, yang diukur dengan indikator kinerja “Indeks Pelayanan Publik (IPP) DPMPTSP”. Capaian indikator kinerja sasaran yang ditunjukan pada Indeks Pelayanan Publik (IPP) terhadap pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan DPMPTSP tidak dapat diketahui karena sesuai dengan surat dari Kementrian PAN-RB RI Nomor B/128/PP.02/2024 tanggal 29 April 2024 tentang Pemberitahuan Jadwal Kegiatan PEKPPP Nasional Lingkup Kabupaten dan Kota bahwa DPMPTSP Kabupaten

Tangerang tidak menjadi lokus penilaian pada tahun 2024. Untuk tahun 2025 DPMPTSP belum menerima informasi apakah akan menjadi lokus dalam penilaian Indeks Pelayanan Publik (IPP). Akan tetapi untuk penilaian indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan sampai Triwulan I Tahun 2025 ini telah dicapai sebesar 88,00.

3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah, yang diukur dengan "Nilai AKIP DPMPTSP Kabupaten Tangerang". Pada tahun 2024 DPMPTSP Kabupaten Tangerang menetapkan target sebesar 81,5 dengan capaian kinerja sebesar 78,15 sehingga rasio capaiannya menjadi 95,89% dengan kategori pencapaian kinerja "Sangat Baik". Berdasarkan hasil penilaian, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tangerang dengan interpretasi predikat telah terwujud *Good Governance*. Seluruh kinerja dikelola dengan baik di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (Reform). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai level individu. Penilaian SAKIP oleh Inspektorat Kabupaten Tangerang dilaksanakan setahun sekali setelah pelaksanaan tahun anggaran berakhir sehingga untuk Triwulan I Tahun 2025 belum ada realisasi capaian.

Adapun dalam bentuk tabel kami sajikan hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024:

Tabel 2.1

Capaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tangerang Tahun 2024

Sasaran	Target Tahun 2024	Capaian Tahun 2024	Rasio Capaian
Persentase Laju Pertumbuhan Investasi	5,12%	-11,51%	84,18%
Indeks Pelayanan Publik (IPP) DPMPTSP	4,06	N/A	N/A
Nilai AKIP DPMPTSP Kabupaten Tangerang	81,5	78,15	95,89%

Terhadap sasaran program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tangerang pada tahun 2024 memiliki 6 (enam) Program, yaitu 5 (lima) Program yang mengampu kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan dan 1 (satu) Program penunjang. Adapun program dan indikator yang dimaksud adalah:

Tabel 2.2
Program, Sasaran, Indikator, Target, Realisasi 2024 dan Target 2025

Program	Sasaran	Indikator Kinerja Program	Target Tahun 2024	Capaian Tahun 2024	Target Tahun 2025	Keterangan
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah DPMPTSP	100%	100%	100%	
	Pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan kebutuhan perangkat daerah	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	100%	100%	100%	
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Meningkatnya pengembangan iklim investasi	Persentase Implementasi Pelayanan Publik Berbasis Keterpaduan	25%	25%	75%	
		Pengembangan Potensi Investasi Regional di dalam Aplikasi Investasi	25%	25%	25%	
Program Promosi Penanaman Modal	Meningkatnya promosi investasi	Persentase peningkatan minat investasi	33,3%	90,96%	33,33%	
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Peningkatan pengendalian penanaman modal	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha pada Sektor Industri dengan Skala Usaha Menengah dan Besar	72%	84,94%	74%	

Program	Sasaran	Indikator Kinerja Program	Target Tahun 2024	Capaian Tahun 2024	Target Tahun 2025	Keterangan
		yang Melaporkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal				
Program Pelayanan Penanaman Modal	Peningkatan pelayanan perizinan Berusaha dan non perizinan yang terintegrasi	Persentase Layanan Perizinan yang sesuai SOP	75%	79,3%	79%	
Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Meningkatkan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Data Perizinan yang Diolah dan Diinformasikan Melalui Sistem Pelaporan Online	75%	78%	80%	

2.2 Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan

Secara Umum pencapaian program dan kegiatan sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Keterkaitan pencapaian kinerja program dan kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, dan misi serta visi sebagaimana yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tangerang bahwa kegiatan-kegiatan secara umum telah dilaksanakan dengan baik.
2. Kendala dan hambatan dalam pelaksanakan program dan kegiatan telah dievaluasi dan akan ditindaklanjuti dalam pelaksanaan Renja Perubahan.

Adapun evaluasi sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 dari program, kegiatan dan sub kegiatan secara rinci sebagai berikut:

Tabel 2.3
Evaluasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Triwulan I Tahun 2025

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Lebih/ (Kurang) (Rp.)	Capaian Anggaran (%)
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	25.307.188.787	6.123.476.496	(19.183.712.291)	24,20%
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	22.252.876.267	5.640.579.246	(16.612.297.021)	25,35%
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	142.882.100	33.732.375	(109.149.725)	23,61%
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	75.308.600	18.777.000	(56.531.600)	24,93%
	Sub Kegiatan Koordinasi dan PenyusunanLaporan Capaian Kinerja danIkhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.298.500	9.703.375	(5.595.125)	63,43%
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	52.275.000	5.252.000	(47.023.000)	10,05%
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	18.751.172.811	4.819.753.121	(13.931.419.690)	25,70%
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	18.681.921.901	4.791.200.871	(13.890.721.030)	25,65%
	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	19.418.500	9.052.250	(10.366.250)	46,62%
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	38.078.910	19.500.000	(18.578.910)	51,21%
	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	11.753.500	-	(11.753.500)	0,00%
3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	86.984.000	-	(86.984.000)	0,00%
	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	86.984.000	-	(86.984.000)	0,00%
4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.464.619.290	431.561.750	(1.033.057.540)	29,47%
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	25.314.000	-	(25.314.000)	0,00%

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Lebih/ (Kurang) (Rp.)	Capaian Anggaran (%)
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	295.452.000	29.100.000	(266.352.000)	9,85%
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	57.825.584	4.701.200	(53.124.384)	8,13%
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	174.493.206	144.019.500	(30.473.706)	82,54%
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	119.239.500	71.261.050	(47.978.450)	59,76%
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.054.000	-	(6.054.000)	0,00%
	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	101.325.000	14.746.000	(86.579.000)	14,55%
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	684.916.000	167.734.000	(517.182.000)	24,49%
5	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	117.430.300	-	(117.430.300)	0,00%
	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	117.430.300	-	(117.430.300)	0,00%
6	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	932.550.898	261.795.000	(670.755.898)	28,07%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.925.330	-	(1.925.330)	0,00%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	132.000.000	33.000.000	(99.000.000)	25,00%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	798.625.568	228.795.000	(569.830.568)	28,65%
7	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	757.236.868	93.737.000	(663.499.868)	12,38%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	644.136.868	93.737.000	(550.399.868)	14,55%
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	113.100.000	-	(113.100.000)	0,00%
II	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	792.034.100	76.065.000	(715.969.100)	9,60%
8	Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	202.371.650	-	(202.371.650)	0,00%
	Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	128.586.150	-	(128.586.150)	0,00%
	Sub Kegiatan Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	73.785.500	-	(73.785.500)	0,00%
9	Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	589.662.450	76.065.000	(513.597.450)	12,90%
	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	168.420.450	2.920.000	(165.500.450)	1,73%
	Sub Kegiatan Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	421.242.000	73.145.000	(348.097.000)	17,36%

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Lebih/ (Kurang) (Rp.)	Capaian Anggaran (%)
III	Program Promosi Penanaman Modal	341.600.580	21.860.000	(319.740.580)	6,40%
10	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	341.600.580	21.860.000	(319.740.580)	6,40%
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	286.321.230	21.860.000	(264.461.230)	7,63%
	Sub Kegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	55.279.350	-	(55.279.350)	0,00%
IV	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	302.000.680	91.452.050	(210.548.630)	30,28%
11	Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	302.000.680	91.452.050	(210.548.630)	30,28%
	Sub Kegiatan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	98.508.700	25.898.250	(72.610.450)	26,29%
	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	91.048.110	-	(91.048.110)	0,00%
	Sub Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal	112.443.870	65.553.800	(46.890.070)	58,30%
V	Program Pelayanan Penanaman Modal	1.134.289.460	212.373.400	(921.916.060)	18,72%
12	Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	1.134.289.460	212.373.400	(921.916.060)	18,72%
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	532.986.200	57.753.250	(475.232.950)	10,84%
	Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	310.062.500	94.287.500	(215.775.000)	30,41%
	Sub Kegiatan Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	198.584.960	54.906.000	(143.678.960)	27,65%
	Sub Kegiatan Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	92.655.800	5.426.650	(87.229.150)	5,86%
VI	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	484.387.700	81.146.800	(403.240.900)	16,75%
13	Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintergrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	484.387.700	81.146.800	(403.240.900)	16,75%
	Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	484.387.700	81.146.800	(403.240.900)	16,75%

Berdasarkan hasil evaluasi program, kegiatan dan sub kegiatan bahwa pelaksanaan dalam tahun berjalan (selama Triwulan I Tahun 2025) menunjukkan adanya ketidaksesuaian dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaannya, maka diperlukan penyesuaian terhadap target kinerja dan indikator kinerja sub kegiatan, penambahan/pengurangan pagu anggaran kegiatan, pergeseran pagu anggaran kegiatan di beberapa sub kegiatan sebagai berikut:

1. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.
2. Sub Kegiatan Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
3. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel.
4. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

Kendala yang ditemui pada pelaksanaan sub kegiatan diatas yaitu karena pihak ketiga belum terdaftar dalam Coretax sehingga rencana tindaklanjutnya pihak ketiga didorong untuk mendaftar Coretax dan sub kegiatan tersebut digeser untuk dilaksanakan pada Triwulan II.

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2025

Indikator dan Target Kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang mengacu pada Sasaran Perangkat Daerah			
1	Persentase Laju Pertumbuhan Investasi	Persen	5,12
2	Indeks Pelayanan Publik (IPP) DPMPTSP	Angka	4,11
3	Nilai AKIP DPMPTSP Kabupaten Tangerang	Angka	82,00

Tabel 2.4
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025

No	Sasaran PD	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2024	Satuan	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan								Ket
							Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2024		Target Renja SKPD TW II Tahun 2025		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2025 (%)		
							Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah DAN Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan DPMPTSP	100%	100%	Persen	100%	21.641.444.357	54,43%	13.075.893.485	54,43%	11.574.735.928	100,00%	88,52%	
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen perencanaan dan Pelaporan	1	1	Persen	100%	259.352.740	57,14%	95.769.350	57,14%	95.769.350	100,00%	100,00%	
			Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	43	14	Dokumen	14	259.352.740	8	95.769.350	8	95.769.350	100,00%	100,00%	
		Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16	5	Dokumen	5	78.261.640	3	69.938.600	3	69.938.600	100,00%	100,00%	
		Sub Kegiatan Koordinasi dan PenyusunanLaporan Capaian Kinerja danIkhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15	5	Laporan	5	20.580.000	3	14.001.750	3	14.001.750	100,00%	100,00%	
		Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12	4	Laporan	4	160.511.100	2	11.829.000	2	11.829.000	100,00%	100,00%	
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	Persen	100%	16.764.109.351	47,37%	11.081.865.613	47,37%	9.796.351.078	100,00%	88,40%	
			Jumlah laporan keuangan	57	20	Dokumen	20		9	11.081.865.613	9	9.796.351.078	100,00%	88,40%	
		Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100	70	Orang/Bulan	70	16.647.824.851	67	11.040.173.363	67	9.754.658.828	100,00%	88,36%	
		Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	6	2	Dokumen	2	15.300.400	1	13.432.250	1	13.432.250	100,00%	100,00%	
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12	5	Laporan	5	90.914.800	2	28.260.000	2	28.260.000	100,00%	100,00%	
		Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	3	1	Dokumen	1	10.069.300	-	-	-	-			

No	Sasaran PD	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2024	Satuan	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan								Ket
							Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2024		Target Renja SKPD TW II Tahun 2025		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2025 (%)		
							Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang meningkat kapasitasnya	100%	100%	Persen	100%	41.401.600	0%	-	0%	-			
			Jumlah pegawai yang difasilitasi	110	100	Orang	100		0%	-	0%	-			
		Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	110	100	Paket	100	41.401.600	0	-	0	-			
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	Persen	100%	2.804.658.700	100,00%	817.621.254	100,00%	761.119.750	100,00%	93,09%	
			Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	24	7	Jenis	7		7	817.621.254	7	761.119.750	100,00%	93,09%	
		Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	30	14	Paket	14	41.607.500	-	-	-	-			
		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	45	43	Paket	43	1.402.901.500	8	142.615.000	8	138.600.000	100,00%	97,18%	
		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	30	53	Paket	53	66.209.000	26	57.825.584	26	57.793.400	100,00%	99,94%	
		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	150	52	Paket	52	171.776.300	47	153.430.300	47	149.609.500	100,00%	97,51%	
		Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	60	12	Paket	12	135.850.400	4	92.015.370	4	83.228.350	100,00%	90,45%	
		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		36	0		0	-	6	3.027.000	0	-	0,00%	0,00%	
		Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	36	12	Laporan	12	232.241.000	6	55.225.000	6	54.925.000	100,00%	99,46%	
		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36	12	Laporan	12	754.073.000	6	313.483.000	6	276.963.500	100,00%	88,35%	
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase pemenuhan barang milik daerah	100	-	Unit			100%	117.430.300	100%	115.700.000	100,00%	98,53%	
			Jumlah barang milik daerah	8	-				2	117.430.300	2	115.700.000	100,00%	98,53%	
		Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	8	-	Unit			3	117.430.300	3	115.700.000	100,00%	98,53%	
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Jasa Penunjang	100%	100%	Persen	100%	864.574.200	100%	587.671.034	100%	469.267.250	100,00%	79,85%	
			Tersedianya Jasa Penunjang	9	3	Jenis	3		3	587.671.034	3	469.267.250	100,00%	79,85%	

No	Sasaran PD	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2024	Satuan	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan								Ket
							Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2024		Target Renja SKPD TW II Tahun 2025		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2025 (%)		
							Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	36	12	Laporan	12	2.086.000	6	1.142.250	6	1.142.250	100,00%	100,00%	
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36	12	Laporan	12	139.526.700	6	66.000.000	6	66.000.000	100,00%	100,00%	
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36	12	Laporan	12	722.961.500	6	520.528.784	6	402.125.000	100,00%	77,25%	
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	100%	Persen	100%	907.347.767	100%	375.535.934	100%	336.528.500	100,00%	89,61%	
			Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	3	Jenis	3		2	375.535.934	2	336.528.500	100,00%	89,61%	
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	120	26	Unit	26	592.074.604	12	318.535.934	12	281.618.500	100,00%	88,41%	
		Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	36	117	Unit	117	83.200.000	42	57.000.000	42	54.910.000	100,00%	96,33%	
		Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	2	Unit	2	232.073.163	0	-	0	-			
		Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	1	-	0	0	-	0	-	0	-			
2.	Mengembangkan Laju pertumbuhan investasi	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal								223.876.000		223.876.000		100,00%	
			Persentase Implementasi Pelayanan Publik Berbasis Keterpaduan	100	25	Persen	25%	2.564.781.020	0%	-	0%				
			Pengembangan Potensi Investasi Regional di dalam Aplikasi Investasi	75	25	Persen	25%	560.424.260	5%	223.876.000	0%	223.876.000	0,00%	100,00%	
		Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kemudahan berusaha	60	10	Persen	10%	2.564.781.020	0%	-	0%				

No	Sasaran PD	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2024	Satuan	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan								Ket
							Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2024		Target Renja SKPD TW II Tahun 2025		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2025 (%)		
							Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
			Tersedianya dokumen laporan hasil dari penetapan kebijakan kemudahan investasi dan evaluasi terhadap pemberian fasilitas/insentif dalam pelaksanaan investasi	15	1	Dokumen	1	2.564.781.020	0	-	0	-			
		Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	7	6	Dokumen	6	2.564.781.020	0	-	0	-			
		Sub Kegiatan Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	12	-	Dokumen				-	0%	-			
		Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Tersedianya Proyeksi Potensi dan Peluang Investasi yang di manfaatkan oleh pemerintah, investor dan masyarakat luas	1	1	Aplikasi	1	560.424.260	0%	223.876.000	0	223.876.000		100,00%	
			Tersedianya Data Potensi dan Proyeksi Investasi Penanaman Modal	3	1	Dokumen	1	560.424.260	0	223.876.000	0	223.876.000		100,00%	
		Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	2	-	Dokumen			1	25.464.000	0	25.464.000	0,00%	100,00%	
		Sub Kegiatan Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	3	1	Dokumen	1	560.424.260	0	198.412.000	0	198.412.000		100,00%	
		Program Promosi Penanaman Modal	Persentase peningkatan minat investasi	1	0,9096	Persen	33,30%	502.112.300	14,41%	41.150.000	14,41%	41.150.000	100,00%	100,00%	
		Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase peningkatan minat investasi	100%	90,96%	Persen	33,30%	502.112.300	14,41%	41.150.000	14,41%	41.150.000	100,00%	100,00%	
			Jumlah Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan	55.500	50.485	NIB	18500	502.112.300	8.000	41.150.000	8.000	41.150.000	100,00%	100,00%	
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	9	3	Dokumen	3	502.112.300	0	41.150.000	0	41.150.000		100,00%	
		Sub Kegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	3	-	Dokumen	0	-	0	-	0	-			

No	Sasaran PD	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2024	Satuan	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan								Ket
							Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2024		Target Renja SKPD TW II Tahun 2025		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2025 (%)		
							Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha pada Sektor Industri dengan Skala Usaha Menengah dan Besar yang Melaporkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal	75	84,94	Persen	72,00%	1.264.229.570	34,00%	165.275.236	40,00%	165.267.270	117,65%	100,00%	
		Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha pada sektor Industri dengan skala usaha Menengah dan Besar yang melaporkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	75	84,94	Persen	72,00%	1.264.229.570	50,00%	165.275.236	62,65%	165.267.270	125,30%	100,00%	
			Jumlah pelaku usaha yang melaporkan laporan kegiatan penanaman modal (LKPM)	5000	6840	Pelaku Usaha	3000	1.264.229.570	2000	165.275.236	2506	165.267.270	125,30%	100,00%	
		Sub Kegiatan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	1350	418	Kegiatan Usaha	300	126.126.540	40	52.334.800	72	52.332.750	180,00%	100,00%	
		Sub Kegiatan Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	1440	520	Pelaku Usaha	580	552.083.630	60	30.349.370	90	30.348.720	150,00%	100,00%	
		Sub Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	576	225	Kegiatan Usaha	218	586.019.400	60	82.591.066	70	82.585.800	116,67%	99,99%	
3.	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Layanan Perizinan yang seusuai SOP			Angka	75	1.464.340.950	75%	518.421.480	75%	508.820.720	100,00%	98,15%	
		Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi	Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Perizinan Investasi	91,5	89,5	Angka	90,5	1.464.340.950	90%	518.421.480	89,25%	508.820.720	99,17%	98,15%	

No	Sasaran PD	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2024	Satuan	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan								Ket
							Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2024		Target Renja SKPD TW II Tahun 2025		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2025 (%)		
							Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
		Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota													
			Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Perizinan Investasi	91,5	89,5	Angka	90,5	1.464.340.950	90%	518.421.480	89%	508.820.720	99,17%	98,15%	
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	12	4	Dokumen	4	600.183.490	2	221.682.600	2	221.642.600	100,00%	99,98%	
		Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	18498	7281	Pelaku Usaha	5992	304.140.000	2774	164.262.500	3531	164.262.500	127,29%	100,00%	
		Sub Kegiatan Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	180	418	Pelaku Usaha	90	392.800.060	30	107.676.480	33	98.116.320	110,00%	91,12%	
		Sub Kegiatan Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	2000	618	Kegiatan Usaha	618	167.217.400	50	24.799.900	50	24.799.300	100,00%	100,00%	
		Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Data Perizinan yang Diolah dan Diinformasikan Melalui Sistem Pelaporan Online	85	78	Persen	75%	728.826.640	70	276.500.276	70	217.213.750	100,00%	78,56%	
		Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintergrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase data perizinan yang diolah dan diinformasikan melalui sistem pelaporan online	85	5	Persen	75%	728.826.640	70%	276.500.276	70%	217.213.750	100,00%	78,56%	
			Jumlah data perizinan yang dikelola dan diinformasikan melalui sistem pelaporan online	4	5	Dokumen	4	728.826.640	2	276.500.276	2	217.213.750	100,00%	78,56%	
		Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah data perizinan yang dikelola dan diinformasikan melalui sistem pelaporan online	4	5	Dokumen	4	728.826.640	2	276.500.276	2	217.213.750	100,00%	78,56%	

No	Sasaran PD	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2024	Satuan	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan								Ket
							Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2024		Target Renja SKPD TW II Tahun 2025		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2025		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2025 (%)		
							Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
		Rata-rata capaian Kinerja											99,08%	93,37%	
		Total Anggaran						28.726.159.097		14.301.116.477		12.731.063.668			
		Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja		Koordinasi internal di bidang maupun antar struktural berjalan lancar											
				SDM yang kompeten dalam pengembangan iklim investasi dan pelayanan terpadu satu pintu											
		Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja		Adanya ketergantungan dari Pemerintah Pusat dalam pelaporan capaian kinerja											
				Tidak maksimalnya penyerapan anggaran karena bebrapa penyedia belum memiliki akses Coretax											

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Kerja Perubahan, maka Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tangerang berkewajiban menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) OPD yang berpedoman pada Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2025.

Adapun perubahan Rencana Program dan Kegiatan Dalam Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025 tidak lepas dari Peraturan Bupati Tangerang tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025. Adapun Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 DPMPTSP Kabupaten Tangerang

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH/ BERKURANG
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 9-7
		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				**26.402.335.544**	**26.685.815.142**	**26.483.254.509**	**80.918.965**
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**26.402.335.544**	**26.685.815.142**	**26.483.254.509**	**80.918.965**
	2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**				**26.402.335.544**	**26.685.815.142**	**26.483.254.509**	**80.918.965**
1.	**2.18.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah DPMPTSP**	**100 Persen**	**100 Persen**	**21.247.627.044**	**23.037.860.772**	**23.428.941.989**	**5.617.572.956**
	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14 Dokumen	14 Dokumen	275.394.000	194.137.391	142.882.100	(132.511.900)
	2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	117.712.000	102.251.600	75.308.600	(42.403.400)
	2.18.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	5 Laporan	31.983.600	21.678.500	15.298.500	(16.685.100)
	2.18.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	125.698.400	70.207.291	52.275.000	(73.423.400)
	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan	19 Dokumen	19 Dokumen	18.079.951.544	18.774.361.711	19.853.438.533	1.773.486.989
	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	69 Orang/ bulan	70 Orang/ bulan	17.984.371.544	18.681.921.901	19.784.187.623	1.799.816.079
	2.18.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan							
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen	2 Dokumen	26.300.000	25.940.000	19.418.500	(6.881.500)
	2.18.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD							
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan	4 Laporan	4 Laporan	53.340.000	50.779.810	38.078.910	(15.261.090)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH/ BERKURANG
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	
			Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD						
	2.18.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran							
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	15.940.000	15.720.000	11.753.500	(4.186.500)
	2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang difasilitasi	100 Orang	100 Orang	34.730.000	86.984.000	86.984.000	52.254.000
	2.18.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya							
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	100 Paket	100 Paket	34.730.000	86.984.000	86.984.000	52.254.000
	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	8 Jenis	8 Jenis	1.293.993.933	2.174.085.604	1.464.619.290	170.625.357
	2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	6 Paket	30.000.000	25.314.000	25.314.000	(4.686.000)
	2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	16 Paket	11 Paket	297.000.000	295.452.000	295.452.000	(1.548.000)
	2.18.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	15 Paket	26 Paket	25.000.000	57.825.584	57.825.584	32.825.584
	2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	29 Paket	55 Paket	137.964.000	153.430.300	174.507.206	36.543.206
	2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket	7 Paket	50.000.000	140.768.720	119.239.500	69.239.500
	2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan							
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	4.350.000	6.054.000	6.054.000	1.704.000
	2.18.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu							
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	149.440.000	128.700.000	101.325.000	(48.115.000)
	2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	600.239.933	1.366.541.000	684.902.000	84.662.067
	2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah	2 Unit	3 Unit	120.000.000	117.430.300	117.430.300	(2.569.700)
	2.18.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel							

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH/ BERKURANG
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	3 Unit	120.000.000	117.430.300	117.430.300	(2.569.700)
	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang	3 Jenis	3 Jenis	859.605.000	933.624.898	1.006.350.898	146.745.898
	2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	3.000.000	2.999.330	1.925.330	(1.074.670)
	2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	132.000.000	132.000.000	132.000.000	0
	2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	724.605.000	798.625.568	872.425.568	147.820.568
	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 Jenis	2 Jenis	583.952.567	757.236.868	757.236.868	173.284.301
	2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	27 Unit	26 Unit	540.652.567	644.136.868	644.136.868	103.484.301
	2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	46 Unit	84 Unit	43.300.000	113.100.000	113.100.000	69.800.000
2.	**2.18.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**Pengembangan Potensi Investasi Regional (PIR) di dalam Aplikasi Investasi**	**25 Persen**	**25 Persen**	**1.435.959.000**	**928.160.300**	**792.034.100**	**1.660.041.000**
			Persentase implementasi pelayanan publik berbasis keterpaduan (MPP)	**75 Persen**	**75 Persen**				
	2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya dokumen laporan hasil dari penetapan kebijakan kemudahan investasi dan evaluasi terhadap pemberian fasilitas/insentif dalam pelaksanaan investasi	7 Dokumen	4 Dokumen	346.010.000	283.459.850	202.371.650	(143.638.350)
	2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal							
			Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	3 Dokumen	3 Dokumen	220.260.000	185.760.150	128.586.150	(91.673.850)
	2.18.02.2.01.0004	Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko							
			Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	4 Dokumen	1 Dokumen	125.750.000	97.699.700	73.785.500	(51.964.500)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH/ BERKURANG
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	
	2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Tersedianya Data Potensi dan Proyeksi Investasi Penanaman Modal	1 Dokumen	1 Dokumen	1.089.949.000	644.700.450	589.662.450	(500.286.550)
	2.18.02.2.02.0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota							
			Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	589.619.600	189.071.450	168.420.450	(421.199.150)
	2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota							
			Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	500.329.400	455.629.000	421.242.000	(79.087.400)
3.	**2.18.03**	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**Persentase peningkatan minat investasi**	**33 Persen**	**33 Persen**	**663.949.500**	**357.873.580**	**341.600.580**	**776.050.500**
	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan	18500 NIB	18500 NIB	663.949.500	357.873.580	341.600.580	(322.348.920)
	2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota							
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	3 Dokumen	3 Dokumen	605.679.000	299.603.230	286.321.230	(319.357.770)
	2.18.03.2.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota							
			Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	58.270.500	58.270.350	55.279.350	(2.991.150)
4.	**2.18.04**	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**Persentase Layanan Perizinan yang seusuai SOP**	**79 Persen**	**79 Persen**	**1.754.800.000**	**1.377.467.990**	**1.134.289.460**	**1.125.200.000**
	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Perizinan Investasi	91,0 Angka	91,0 Angka	1.754.800.000	1.377.467.990	1.134.289.460	(620.510.540)
	2.18.04.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah							
			Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Dokumen	4 Dokumen	850.000.000	685.280.990	532.986.200	(317.013.800)
	2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik							
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	6163 Pelaku Usaha	6163 Pelaku Usaha	350.000.000	328.025.000	310.062.500	(39.937.500)
	2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko							
			Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	60 Pelaku Usaha	60 Pelaku Usaha	300.000.000	239.630.000	198.584.960	(101.415.040)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH/ BERKURANG
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	
	2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko							
			Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	665 Kegiatan Usaha	100 Kegiatan Usaha	254.800.000	124.532.000	92.655.800	(162.144.200)
5.	**2.18.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha pada Sektor Industri dengan Skala Usaha Menengah dan Besar yang Melaporkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal**	**74 Persen**	**74 Persen**	**700.000.000**	**437.076.500**	**302.000.680**	**1.316.000.000**
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha yang melaporkan laporan kegiatan penanaman modal (LKPM)	4000 Pelaku Usaha	4000 Pelaku Usaha	700.000.000	437.076.500	302.000.680	(397.999.320)
	2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya							
			Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	450 Kegiatan Usaha	85 Kegiatan Usaha	150.000.000	143.049.700	98.508.700	(51.491.300)
	2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha							
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	480 Pelaku Usaha	120 Pelaku Usaha	350.000.000	120.262.410	91.048.110	(258.951.890)
	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal							
			Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	192 Kegiatan Usaha	120 Kegiatan Usaha	200.000.000	173.764.390	112.443.870	(87.556.130)
6.	**2.18.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**Persentase Data Perizinan yang Diolah dan Diinformasikan Melalui Sistem Pelaporan Online**	**80 Persen**	**80 Persen**	**600.000.000**	**547.376.000**	**484.387.700**	**840.000.000**
	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data perizinan yang dikelola dan diinformasikan melalui sistem pelaporan online	4 Dokumen	4 Dokumen	600.000.000	547.376.000	484.387.700	(115.612.300)
	2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik							

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH/ BERKURANG
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	
			Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	4 Dokumen	4 Dokumen	600.000.000	547.376.000	484.387.700	(115.612.300)
	J U M L A H					**26.402.335.544**	**26.685.815.142**	**26.483.254.509**	**80.918.965**

Berdasarkan hasil analisis antara Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026 dengan Renja Perubahan Tahun 2025 terdapat 3 Kegiatan yang memiliki perbedaan dalam target capaian indikatornya. Kegiatan tersebut meliputi:

Tabel 3.2
Perbandingan Target Renstra 2024-2026 dan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 DPMPTSP Kabupaten Tangerang

No.	Nama Kegiatan atau Sub Kegiatan	Target Renja	Target Renstra	Alasan
1.	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	70 Orang/ bulan	100 Orang/ bulan	Menyesuaikan dengan jumlah pegawai terbaru
2.	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	100 Paket	110 Paket	Menyesuaikan dengan kebutuhan
3.	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-	1 Dokumen	Tidak dilaksanakan di Renja karena menyesuaikan dengan kebutuhan dan pagu anggaran
4.	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6 Paket	10 Paket	Menyesuaikan dengan kebutuhan
5.	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11 Paket	15 Paket	Menyesuaikan dengan kebutuhan
6.	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	26 Paket	10 Paket	Menyesuaikan dengan kebutuhan (Kebutuhan Mal Pelayanan Publik Ciputra dan Gerai Pelayanan Publik Intermoda)
7.	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	55 Paket	50 Paket	Menyesuaikan dengan kebutuhan (Kebutuhan Mal Pelayanan Publik Ciputra dan Gerai Pelayanan Publik Intermoda)
8.	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7 Paket	20 Paket	Menyesuaikan dengan kebutuhan (Efisiensi jenis cetakan)
9.	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	3 Unit	-	Menyesuaikan dengan kebutuhan
10.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	26 Unit	40 Unit	Menyesuaikan dengan kondisi terbaru jumlah kendaraan dinas
11.	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	84 Unit	12 Unit	Menyesuaikan dengan kondisi terbaru jumlah peralatan dan mesin

No.	Nama Kegiatan atau Sub Kegiatan	Target Renja	Target Renstra	Alasan
12.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	2 Unit	Tidak dilaksanakan karena menyesuaikan pagu anggaran
13.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	1 Unit	Tidak dilaksanakan karena menyesuaikan pagu anggaran
14.	Sub Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	4 Dokumen	5 Dokumen	Menyesuaikan dengan kebutuhan dan kegiatan yang dilaksanakan
15.	Sub Kegiatan Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	1 Dokumen	5 Dokumen	Menyesuaikan dengan kebutuhan dan kegiatan yang dilaksanakan

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tangerang Tahun 2025 ini mengacu pada hasil evaluasi Rencana Kerja Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I 2025 yang merupakan bagian dari rangkaian perencanaan yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan kegiatan.

Perubahan Renja ini juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah, maka Perangkat Daerah termasuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tangerang berkewajiban menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tangerang Tahun 2025 dan bersifat indikatif. Untuk perhitungan kebutuhan program, kegiatan dan sub kegiatan menyesuaikan standarisasi harga barang dan jasa yang ada di SIPD Kemendagri yang sudah di update oleh Perangkat Daerah yang berwenang di Pemerintah Kabupaten Tangerang, serta disesuaikan dengan kebijakan Pemerintah Pusat yang harus segera dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tangerang Tahun 2025 dari hasil rekapitulasi program dan kegiatan ada penambahan pagu indikatif sebesar Rp. 80.918.965,- atau 0,31% dari Pagu Anggaran RKPD Murni sebesar Rp. 26.402.335.544,- menjadi Pagu Anggaran RKPD Perubahan sebesar Rp. 26.483.254.509,- (setelah dilakukan refocusing / efisiensi). Perubahan anggaran ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKPA) dan DPA Perubahan (DPPA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tangerang Tahun 2025.

32. KECAMATAN TIGARAKSA

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Kedudukan susunan organisasi, tugas dan fungsi Kecamatan dengan berlakunya Otonomi Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 telah merubah fungsi Kecamatan sebagai perangkat wilayah dalam asas Dekonsentrasi menjadi perangkat daerah dalam asas Desentralisasi.

Sebagai perangkat daerah, Camat dalam menjalankan tugasnya mendapat pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah dan bertanggungjawab kepada Bupati. Dengan demikian, peran Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan lebih sebagai pemberi makna pemerintahan di wilayah kecamatan. Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat.

Dalam melaksanakan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah secara luas dan nyata, harus disertai tanggungjawab yang juga nyata dan dilaksanakan oleh seluruh pelaku pembangunan baik ditingkat lokal, regional maupun secara nasional, dari tingkat administrasi yang paling kecil (kelurahan/desa), kecamatan, kabupaten dan kota, provinsi dan negara. Tanggungjawab sesuai dengan lingkup tugas yang diemban itulah yang disebut sebagai suatu komitmen. Komitmen-komitmen inilah yang terdapat di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) disusun dengan maksud untuk menyediakan dokumen perencanaan lima tahunan, yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maka dalam menjalankan roda pemerintahan di daerah sebagai bagian dari Otonomi Daerah diperlukan adanya suatu perencanaan strategis dan perencanaan kerja yang merupakan bagian dari managemen strategis daerah. Sebagai aplikasi dari uraian di atas maka perlu disusun suatu Rencana Strategis yang dikenal dengan (Renstra) yang merupakan suatu wujud dari model penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*). Selanjutnya berdasarkan rencana strategis yang telah disusun akan di implementasikan dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) Tahunan yang merupakan dasar dari penilian keberhasilan pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan kecamatan.

Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Tahunan pada level Satuan Kerja Perangkat Daerah dan disusun sebagai Penjabaran Rencana Strategis (Renstra) yang berisi informasi tentang rencana program dan kegiatan yang akan dikerjakan

oleh Rencana SKPD dalam satu tahun anggaran yang dilengkapi kerangka anggaran dan kerangka regulasi serta memberikan gambaran mengenai tujuan, sasaran dan target kinerja dan bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan SKPD sesuai tupoksinya.

1.2 DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Rencana`Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023

15. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 33 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang.

1.3 MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

a. MAKSUD

Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Tigaraksa Tahun 2024 disusun dengan maksud untuk memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta pemberdayaan masyarakat. Kegiatan-kegiatan satu tahun kedepan yang tertuang dalam Rencana Kerja Kecamatan Tigaraksa merupakan implementasi dari Rencana Strategis Pemerintah Kecamatan Tigaraksa maupun semua lapisan masyarakat sehingga, pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan dan hasil-hasil pelayanan public dapat menciptakan kondisi yang kondusif dan mendapatkan pengakuan dari elemen masyarakat.

b. TUJUAN

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Tigaraksa Tahun 2024, antara lain:

1. Untuk Memberikan arahan dan pedoman bagi Kecamatan Tigaraksa dalam melaksanakan program dan kegiatan satu tahun kedepan;
2. Sebagai input dalam rangka perbaikan pelaksanaan tugas dan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan satu tahun kedepan;
3. Membuat acuan perencanaan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD Kecamatan;
4. Sebagai bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas pemerintahan Kecamatan berikutnya.

c. SASARAN

Sasaran dalam Rencana Kerja (Renja) adalah sasaran yang telah ditetapkan pada Renstra Tahun 2024-2026. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Adapun sasaran yang ingin dicapai Kecamatan Tigaraksa adalah :

1. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dengan indikator Indeks Pelayanan Publik;
2. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dengan indikator Nilai SAKIP;

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Dokumen Rencana Kerja Kecamatan Tigaraksa di formulasikan dalam sistematika penulisan sebagai berikut:

BABI PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

BABII EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategis Perangkat Daerah
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PerangkatDaerah
2.4 Review Terhadap Rencana Awal RKPD
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III RENCANA KERJA DAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Capaian Rencana Strategis Perangkat Daerah

Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang pada Tahun Anggaran 2025 Pagu Murni sebesar Rp **34.795.485.273,00** dan pada bulan Februari mendapatkan rasionalisasi sehingga menjadi Rp 34.101.958.934,00 untuk. sampai triwulan I Tahun 2025 telah terserap sebesar Rp (8.382.249.362,00) atau 24,58%**.** Diharapkan RealisasiBelanja tahun 2025 dapat tercapai dan dapat menyerap anggaran sesuai dana yang diberikan Pada Tahun 2025. diperkirakan Rencana Kerja Anggaran Perubahan Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang sebesar **Rp. 34.524.167.304,00.** Pada tahun 2025 sampai dengan triwulan I secara keseluruhan program dan kegiatan serta sub kegiatan telah dilaksanakan sesuai target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja 2025, namun ada satu sub kegiatan yaitu **Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor tidak terserap di Triwulan I 2025 dikarenakan jumlah anggaran yang tidak sesuai dengan spesifikasinya.**

Berdasarkan target kinerja yang diperoleh atas pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2025 Kecamatan Tigaraksa dapat dikemukakan secara umum faktor-faktor penyebab perubahan anggaran tahun 2025 antara lain sebagai berikut:

1. Pada PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA dari pagu awal berapa Rp 13.423.499.375,00 menjadi berapa Rp 13.493.321.745,00 perubahan ini sebagian berasal dari penyesuaian gaji dan tunjangan dan adanya penyesuaian belanja peratalatan (microphone)

Adapun indikator kinerja utama selama tahun 2025 yang belum tercapai diantaranya:

1. Pada tahun 2025 atas penilaian LKIP tahun 2024 hanya tercapai sebesar 76.80 sedangkan yang diratgetkan tahun ini adalah 78, Kurang tercapainya target ini salah satunya dikarenakan belum melakukan bimtek SAKIP kepada seluruh pegawai Kecamatan. Sehingga upaya di Tahun 2025 akan lebih meningkatkan lagi nilai AKIP dengan memenuhi rekomendasi yang ada. Dari hasil evaluasi dan moitoring Triwulan I Tahun 2025 merekomendasikan untuk melakukan evaluasi internal ditiap sub unit kinerja, dan dibuatkan Laporan Monev per seksi/sub bagian.

Dari faktor-faktor yang menjadi penyebab tersebut di atas, kedepan Kecamatan Tigaraksa akan melakukan upaya perbaikan / penyempurnaan dengan cara:

1. peningkatan intensitas koordinasi dan konsultasi, kebijakan penganggaran, sinkronisasi program dan kegiatan agar terciptanya perencanaan yang akurat serta
2. pembenahan sumber daya manusia di lingkungan Kecamatan Tigaraksa baik melalui diklat dan bimtek
3. mengusulkan penambahan aparatur dan Tenaga Kontrak sesuai dengan beban kerja yang dibutuhkan.
4. Melakukan rekomendasi yang ada dalam LHE Review Akip Tahun 2024.

Dengan adanya perbaikan / penyempurnaan yang telah ditetapkan diatas kedepan dapat memberikan nilai akip di tahun 2025 dapat meningkat, sehingga dapat mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik dari tahun 2024.

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan II Tahun 2025 Kabupaten Tangerang

Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Tigaraksa

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD Akhir Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2024)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegaitan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD tahun 2024	Realisasi Renja PD tahun 2024	Tingkat Realisasi(%)		Realisasi Capaian Program dan Kegaitan s/d Triwulan II tahun berjalan (2025)	Tingkat capaian realiasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	100%	100,00%	100,00%	100,00%	100	100%	25	100%
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah kecamatan Tigaraksa	100	100	100	100	100	100	25	100
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah kecamatan Tigaraksa	100	100	100	100	100	100	25	100
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian kecamatan Tigaraksa	100	100	100	100	100	100	25	100
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum kecamatan Tigaraka	100	100	100	100	100	100	25	100
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang kecamatan Tigaraksa	100	100	100	100	100	100	25	100
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah kecamatan tigaraksa	100	100	100	100	100	100	25	100

7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Prosentase Pemenuhan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	100	100	100	100	100	25	100
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Prosentase Desa dengan Laporan Keuangan Baik	100	100	100	100	100	100	25	100
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar	100	100	100	100	100	100	25	100
		Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara	100	98	98	98	100	99	25	99
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah sarana dan prasarana PATEN yang dipenuhi	3	3	3	3	100	3	3	100
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah infrastruktur yang dipelihara	100	90	90	90	100	159	37	159
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	3	3	3	3	100	3	1	3
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	100	100	100	100	100	100	25	100
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti Kecamatan Tigaraksa	100	100	100	100	100	100	25	100
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	92	85	85	85	100	87	40	87
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan Kecamatan Tigaraksa	92	85	85	85	100	87	40	87
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksanya pemberdayaan kelurahan	2	2	2	2		2	3	2

7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Prosentase Program Penyelaengaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**50**	**100**
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Jumlah Orang yang mengikuti pembinaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**50**	**100**

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN OPD

Dalam rangka meningkatkan kinerja aparatur Kecamatan Tigaraksa menuju pelaksanaan tata pemerintahan yang baik serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya bidang Penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan masyarakat perlu adanya standar pelayanan minimal. Standar pelayanan minimal merupakan tolok ukur bagi aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Pelayanan Adminitrasi Terpadu Kecamatan

(PATEN)

Kecamatan Tigaraksa

Pelayanan kepada Masyarakat merupakan tujuan utama, untuk itu peningkatan pelayanan kepada masyarakat menjadi visi dan misi yang harus dicapai. Kegiatan pelayanan tidak hanya dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan saja, namun juga harus dilaksanakan oleh pemerintah Desa/Kelurahan yang telah diberikan kewenangan.



Kegiatan pelayanan tidak hanya membangun berbagai sarana dan prasarana pelayanan seperti kantor dan perabotannya saja namun peningkatan kualitas SDM merupakan bagian terpenting dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat, untuk Kecamatan Tigaraksa telah melakukan berbagai pembinaan kepada masyarakat termasuk pemerintah Desa dan Kelurahan, seperti tata naskah dinas,tata laksana administrasi desa, keuangan desa serta pengarsipan surat-surat.



Adapun beberapa hal yang perlu dilakukan untuk keberhasilan pelaksanaan dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, antara lain:

1. Mengoptimalkan kinerja pegawai agar berkualitas sesuai dengan keahliannya;
2. Mengadakan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan bidang tugasnya;
3. Meningkatkan system pelayananmasyarakat yang efektif dan efisien;
4. Meningkatkan system informasi manajemen yang handal;
5. Mengoptimalkan aparatur yang professional yang didukung oleh system pengembangan karier yang berbasis kompetensi dan presetasi.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra			Realisasi Capaian	Proyeksi	Catatan Analisis
				2024	2025	2026	2024	2025	
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	83.60	83.70	83.80	87.25	88.00	Telah sesuai Target

Dari hasil IKM diatas capaian Kinerja pelayanan di Kecamatan Tigaraska sangatlah baik karena telah melebihi target yang telah ditetapkan di dalam Renstra OPD.

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI OPD

Berdasarkan permasalahan, telaahan RPJMD, telaahan RTRW dan KLHS Kabupaten Tangerang, maka isu-isu strategis yang dihadapi oleh Kecamatan Tigaraksa adalah:

1. Belum optimalnya penyelengaraan sistem akuntabilitas pemerintahan di Kecamatan Tigaraksa Sehingga mempengaruhi nilai SAKIP Kecamatan Tigaraksa

Peningkatan kapabilitas pegawai baik yang di Kantor Kecamatan Tigaraksa dan Kelurahan Tigaraksa dan Kelurahan Kaduagung maupun Pemerintah Desa perlu ditingkatkan secara optimal. Peningkatan kapabilitas tersebut akan meningkatkan kompetensi pegawai yang nantinya akan berimplikasi pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Selain dari kompetensi pegawai, untuk optimalisasi pelayanan kepada masyarakat tentunya harus juga mendapat dukungan penganggaran yang cukup sehingga program dan

kegiatan yang mengarah pada tujuan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik.

Penyelenggaraan tugas umum pemerintahan seharusnya menjadi elemen dasar dalam pelaksanaan bidang lainnya. Raihan menjadi Kecamatan Tigaraksa sebagai OPD penyelenggaraan tugas umum pemerintahan yang baik, memerlukan kebijakan melembagakan praktik-praktik penyelenggaraan pemerintahan sebagai bagian dari budaya kerja dan budaya kinerja.

Praktek penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi, pungli dan senantiasa berorientasi pada *customer satisfaction* semestinya menjadi pegangan setiap aparatur sipil negara. Tentu saja peraturan perundang-undangan yang berlaku, berikut Sistem Operasional Prosedur (SOP) maupun Standar Pelayanan (SP) menjadi landasan formal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Praktik-praktik untuk menunjukkan eksistensi pegawai dengan sikap pongah, tidak santun, arogan, dan minta dilayani harus ditinggalkan sejauh-jauhnya. Justru dengan bersikap santun, hormat, ramah, menolak gratifikasi, profesional tanpa harus merendahkan derajat dan “maqom”, ASN akan mampu mengemban tugas negara dengan baik dan tetap disegani.

Peran dari desa perlu dioptimalkan dengan memberi peluang partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Demikian juga dengan peran perempuan dalam pembangunan desa juga masih perlu lebih didorong sehingga dapat mewarnai dan terwakili kepentingannya dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Untuk itu masih perlu upaya dengan pelibatan secara aktif kesemua unsur tersebut dalam tata kelola pemerintahan desa, dengan memberikan tambahan pengetahuan dan pemahaman akan penyelenggaraan pemerintahan termasuk didalamnya fungsi masing-masing stakeholder.

Dari peran seluruh pegawai Kecamatan Tigaraksa, diharapkan isu yang berkaitan dengan belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang baik dan efisien ini bisa terwujud dengan perencanaan yang bersinergi pada rencana strategis Kecamatan Tigaraksa. Dengan adanya dokumen rencana strategis ini diharapkan isue tersebut pada akhir periode Renstra ini dapat terselesaikan dengan baik dan sesuai terget.

2. Belum optimalnya pelayanan di Kecamatan Tigaraksa sehingga mempengaruhi Indek Kepuasan Masyarakat

Pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah khususnya kecamatan, akan menjadi tolok ukur dari citra (nama baik) kecamatan sampai pada tataran pemerintah yang lebih tinggi. Kecamatan merupakan Perangkat Daerah yang berfungsi sebagai garda terdepandalam pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu citra pelayanan yang dapat diberikan oleh Kecamatan Tigaraksa kepada masyarakat di wilayanya akan berpengaruh terhadap citra pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang pada umumnya. Perbaikan dan peningkatan kualitas dalam sistem pelayanan ditingkat Kecamatan Tigaraksa atas pertimbangan perkembangan wilayah, menjadi hal yang harus dilakukan.

Peran strategis pelayanan kecamatan dalam mendukung tatakelola pemerintahan yang baik tidak terlepas dari adanya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dimana ada azas-azas pelayanan publik yang harus diperhatikan, antara lain:

a. Kepentingan umum;
b. Kepastian hukum;
c. Kesamaan hak;
d. Keseimbangan hak dan kewajiban;
e. Keprofesionalan;
f. Partisipatif;
g. Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;
h. Keterbukaan;
i. Akuntabilitas;
j. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
k. Ketepatan waktu; dan
l. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Upaya untuk mewujudkan agar kecamatan menjadi pusat pelayanan masyarakat adalah dikeluarkannya Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). Seluruh Kecamatan di Kabupaten Tangerang telah melaksanakan PATEN sejak Tahun 2015. Itulah perwujudan tekad Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam melakukan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

Penyelenggaraan PATEN di Kecamatan Tigaraksa harus didukung penyelenggaraan pelayanan masyarakat berbasis kewilayahan yang mencakup ***LIMA DIMENSI PATEN***, yaitu pelayanan pemerintahan, pelayanan trantiblinmas, pelayanan informasi dan pengaduan, pelayanan pemberdayaan masyarakat dan pelayanan perekonimian pembangunan Kelima dimensi tersebut harus mengutamakan sinkronisasi antara kebutuhan masyarakat dalam pelayanan dengan kemampuan atau kapasitas Kecamatan dalam memberikan fasilitasdan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Standar Pelayanan Publik (SPP) tiga dimensi di Kecamatan Tigaraksa itu perlu disusun yang penyusunanya melibatkan unsur masyarakat. Tentu saja kelima dimensi itu harus saling bersinergi di dalam pelaksanaantugasnya antara seksi pelayanan dengan semua seksi di Kecamatan.

Salah satu prinsip dalam penyelenggaraan pelayanan sebagaimana yang disebut dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 62 Tahun 2003 yaitu disebutkan bahwa penyelenggaraan pelayanan harus memenuhi beberapa prinsip, salah satunya adalah kelengkapan sarana dan prasarana, yaitu tersedianya sarana dan prasarana kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informasi (telematika). Oleh karena itu, pelayanan tersebut harus dilengkapi dengan gedung-gedung kantor dan juga sarana pendukung kelancaran pelayanan maupun penunjang kegiatan administrasi perkantoran (perangkat keras dan lunak), sehingga sangat membantu dalam menunjang pelaksanaan kegiatan baik untuk kebutuhan administrasi perkantoran maupun pelayanan kepada masyarakat.

Selain kegiatan yang berkaitan langsung dengan pelayanan di Kantor Kecamatan Tigaraksa ada kegiatan pelayanan yang secara tidak langsung kepada Masyarakat yang mempengaruhi dari tingkat kepuasan masyarakat diantaranya kegiatan pemberdayaan masyarakat serta keamanan dan ketertiban di masyarakat serta melakukan peningkatakan sarana dan prasarana fasilitas umum masyarakat dan Penumbuhan wawasan kebangsaan demi menciptakan rasa nasionalisme Masyarakat.

Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan atau kebijakan dalam pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah merupakan tolok ukur keberhasilan pemberdayaan masyarakat. Selain itu keterlibatan komponen atau unsur masyarakat dalam perencanaan pembangunan menjadi sebuah tuntutan pengarusutamaan gender dimana kelompok masyarakat rentan harus mendapatkan hak akses dan partisipasi.

Pengambilan kebijakan Perangkat Daerah kecamatan yang diawali atau dimulai dari proses Musyawarah Pembangunan jelas telah melibatkan berbagai unsur dalam masyarakat. Maka kegiatan-kegiatan yang direncanakan merupakan hasil dari masukan masyarakat melalui Musrenbang. Selain itu sasaran dari program kegiatan juga mengacu kondisi obyektif kebutuhan wilayah.

Salah satu pilar perekonomian rakyat di wilayah Kecamatan Tigaraksa adalah UKM yang tersebar di semua desa dan kelurahan, sementara sektor koperasi belum memiliki peran cukup signifikan dalam perekonomian masyarakat, maka sektor koperasi dan UKM perlu dibina dan dikembangkan dengan memberikan fasilitasi dan pembinaan secara berkelanjutan. Penguatan kedua sektor ini akan meningkatkan ketahanan perekonomian masyarakat Tigaraksa.

Masih tingginya angka kemiskinan dan Penyandang Masalah Kesejateraan Sosial merupakan persoalan yang banyak dihadapi masyarakat saat ini. Menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk melakukan langkah nyata mengatasi masalah tersebut harus selalu dikedepankan dengan berbagai kegiatan yang mengarah pada penyelesaian persoalan tersebut. Pengentasan kemiskinan dengan membantu rehabilitasi dan bedah rumah sebagai kebutuhan primer dan selanjutnya melakukan upaya-upaya pemberdayaan mereka agar secara bertahap seluruh keluarga miskin mengalami peningkatan taraf hidup menuju keluarga sejahtera.

Keterlibatan aktif seluruh komponen masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah bahkan aparat TNI yang berada di wilayah Tigaraksa (Koramil, Posmat AL dan Satradar AU) maupun Kepolisian (POLSEK) akan menjadi sinergi yang baik dan akan menghasilkan kekuatan yang luar biasa dalam membantu mengentaskan kemiskinan di Kecamatan Tigaraksa.

Untuk masalah keamanan dan ketertiban di wilayah Kecamatan Tigaraksa, perlu adanya peningkatan koordinasi dengan pihak terkait baik muspika maupun pemerintah desa dan masyarakat. Koordinasi tersebut untuk menyamakan kebijakan dan langkah implementasi dalam menangani masalah keamanan dan ketertiban wilayah. Selain persoalan tersebut isu strategis lainnya yang perlu mendapatkan prioritas adalah penumbuhan kembali wawasan kebangsaan pada masyarakat. Langkah nyata yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan pembinaan tentang wawasan kebangsaan secara menyeluruh pada masyarakat baik melalui kegiatan formal maupun informal.

Penumbuhan wawasan kebangsaan ini akan meningkatkan rasa nasionalisme dan rasa cinta tanah air yang pada gilirannya juga akan berimplikasi pada berkurangnya gangguan keamanan dan ketertiban di masyarakat.

Metode penentuan isu-isu strategis Kecamatan Tigaraksa antara lain dilakukan dalam forum Focussed Group Discussion (FGD) dengan melibatkan para seluruh aparatur Kecamatan Tigaraksa, Kelurahan Tigaraksa Timur, dan para Kepala Desa se Kecamatan Tigaraksa, serta para pemangku kepentingan yang dalam perumuskan isu-isu strategis. Dengan forum tersebut maka isu-isu strategis di Kecamatan Tigaraksa dapat terangkum sesuai keadaan nyata dan obyektif.

2.4. Review terhadap Rencana Awal RKPD PERUBAHAN

Sebagaimana diketahui bahwa dengan ditetapkannya Perbub Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026, oleh karena itu Mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tangerang 3 tahun kedepan, sesuai dengan peran dan fungsinya, urusan Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang terkait erat dalam mewujudkan tujuan keempat RPD 2024-2026 Kabupaten Tangerang “Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik melalui Digitalisasi dan Integrasi Pelayanan Publik” dan untuk mewujudkan hal tersebut, Kecamatan Tigaraksa menyelenggarakan fungsi koordinasi dan sinergi antar seluruh pihak yang terkait yang ada di Kecamatan Tigaraska Kabupaten Tangerang

Dalam perumusan dokumen RKPD akan mengadopsi dan mengekstraksi dari dokumen RPJMD utamanya dalam rancangan kerangka ekonomi daerah, kebijakan keuangan daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan dalam rangka mewujudkan sinergitas dan sinkronisasi program dan kegiatan antara Pembangunan Nasional dengan Pembangunan Daerah, dikaitkan dengan tugas pokok dan

fungsi Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang yaitu pada misi “Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik melalui Digitalisasi dan Integrasi Pelayanan Publik

RKPD Perubahan Kecamatan Tigaraksa Tahun 2025 merupakan penjabaran tahun kedua dari RPD Kabuapaten Tangerang Tahun 2024-2026. Terkait hal tersebut, dengan mempedomani dokumen RPD, maka tujuan dan sasaran pada dokumen RKPD harus diselaraskan dengan tujuan dan sasaran dokumen RPD yang telah disusun dengan memperhatikan pencapaian target dari sasaran-sasaran pada tahun 2025 dan tahun 2026.

Review terhadap Rencana Kerja RKPD PerubahanTahun 2025 terhadap hasil analisis kebutuhan Kecamatan Tigaraksah dapat dilihat pada tabel 2.5 terlampir

Tabel 2.3

Review Terhadap Rancangan Perubahan Renja Tahun 2025 Kabupaten Tangerang

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Tigaraksa

Rancangan Renja Murni						Rancanagan Renja Perubahan					Catatan Penting
URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	**Lokasi**	**INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN**	**TARGET 2025**	**Pagu APBD 2025**		**URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN**	**Lokasi**	**INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN**	**TARGET PERUBAHAN 2025**	**RKPD PERUBAHAN 2025**	
KECAMATAN TIGARAKSA				**34.795.485.273,00**		**KECAMATAN TIGARAKSA**				**34.524.167.304,00**	
UNSUR KEWILAYAHAN				**34.795.485.273,00**		**UNSUR KEWILAYAHAN**				**34.524.167.304,00**	
KECAMATAN				**30.239.754.268,00**		**KECAMATAN**				**30.157.185.638,00**	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Kecamatan Tigaraksa**	**Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Kec. Tigaraksa**	**100 Persen**	**13.423.499.375,00**		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kecamatan Tigaraksa**	**Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Kec. Tigaraksa**	**100 Persen**	**13.493.321.745,00**	Penyesuaian Gaji Dan Tunjangan Dan Honor Non ASN
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		*Persentase pemenuhan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah kecamatan Tigaraksa*	100 Persen	174.652.000,00		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		*Persentase pemenuhan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah kecamatan Tigaraksa*	100 Persen	168.446.000,00	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	68.940.000,00				*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	4 Dokumen	68.270.000,00	

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	37.522.000,00				*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	4 Laporan	37.016.000,00	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	68.190.000,00				*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	4 Laporan	63.160.000,00	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		*Persentase pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah kecamatan Tigaraksa*	100 Persen	9.951.680.621,00		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		*Persentase pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah kecamatan Tigaraksa*	100 Persen	9.947.696.621,00	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	38 Orang/ b ulan	9.911.092.621,00				*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	38 Orang/b ulan	9.911.092.621,00	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD					

		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	18 Laporan	40.588.000,00				*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD*	18 Laporan	36.604.000,00	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		*Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian kecamatan Tigaraksa*	100 Persen	166.316.000,00		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		*Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian kecamatan Tigaraksa*	100 Persen	99.033.000,00	
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya					
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	58 Paket	38.470.000,00				*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*	35 Paket	38.470.000,00	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					
		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	38 Orang	127.846.000,00				*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*	38 Orang	60.563.000,00	
Administrasi Umum Perangkat Daerah		*Persentase pemenuhan administrasi umum kecamatan Tigaraka*	100 Persen	602.289.400,00		Administrasi Umum Perangkat Daerah		*Persentase pemenuhan administrasi umum kecamatan Tigaraka*	100 Persen	474.966.400,00	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					

		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	24.868.300,00				*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	5 Paket	24.868.300,00	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	88.362.000,00					10 Paket	88.362.000,00	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	27.930.900,00		*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*			5 Paket	27.930.900,00	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor						Penyediaan Bahan Logistik Kantor					
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	52.525.200,00				*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	2 Paket	52.525.200,00	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	92.087.000,00				*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	2 Paket	70.484.000,00	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					

		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	60.000.000,00				*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*	4 Dokumen	60.000.000,00	
Fasilitasi Kunjungan Tamu						Fasilitasi Kunjungan Tamu					
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	149.980.000,00				*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	4 Laporan	100.050.000,00	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	106.536.000,00				*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	12 Laporan	50.746.000,00	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		*Persentase pemenuhan jasa penunjang kecamatan Tigaraksa*	100 Persen	1.329.978.174,00		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		*Persentase pemenuhan jasa penunjang kecamatan Tigaraksa*	100 Persen	1.436.188.174,00	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat						Penyediaan Jasa Surat Menyurat					
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	7.490.000,00				*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	1 Laporan	7.490.000,00	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	249.999.606,00				*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	12 Laporan	250.409.606,00	

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.072.488.568,00				*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	12 Laporan	1.178.288.568,00	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		*Persentase pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah kecamatan Tigaraksa*	100 Persen	1.198.583.180,00		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		*Persentase pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah kecamatan Tigaraksa*	100 Persen	1.366.991.550,00	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Unit	114.054.976,00				*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*	12 Unit	114.054.976,00	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	174.685.304,00				*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	12 Unit	343.093.674,00	

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	17.000.000,00				*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	12 Unit	17.000.000,00	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	892.842.900,00				*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	5 Unit	892.842.900,00	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Kecamatan Tigaraksa**	**Persentase pemeliharaan fasilitas umum yang terpelihara**	100	**14.359.325.593,00**		**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Kecamatan Tigaraksa**	**Persentase pemeliharaan fasilitas umum yang terpelihara**	100	**14.416.705.593,00**	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		*Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar Kecamatan Tigaraksa*	99	**49.110.000,00**		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		*Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar Kecamatan Tigaraksa*	99	**49.110.000,00**	
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan						Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					

		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	49.110.000,00				*Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	1 Laporan	49.110.000,00	
Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum		*Jml infrastruktur yang dipelihara*	159 unit	**14.278.355.593,00**		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum		*Jml infrastruktur yang dipelihara*	160 unit	**14.344.035.593,00**	
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum						Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum					
		Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	155 Dok	14.278.355.593,00				*Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum*	160 Dok	14.344.035.593,00	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		*Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan*	3 Laporan	31.860.000,00		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		*Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan*	3 Laporan	23.560.000,00	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan						Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan					
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	3 Laporan	31.860.000,00				*Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan*	3 Laporan	23.560.000,00	

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Kecamatan Tigaraksa**	**Persentase pemenuhan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan**	**87,00 Persen**	**1.491.053.500,00**		**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kecamatan Tigaraksa**	**Persentase pemenuhan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan**	**87,00 Persen**	**1.403.162.500,00**	
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		*Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan Kecamatan Tigaraksa*	87 Persen	**1.491.053.500,00**		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		*Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan Kecamatan Tigaraksa*	87 Persen	**1.403.162.500,00**	
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa					
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10 Lembaga Kemasyarakatan	110.490.000,00				*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa*	10 Lembaga Kemasyarakatan	110.490.000,00	
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan					
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	1.380.563.500,00				*Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	12 Laporan	1.292.672.500,00	

PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Kecamatan Tigaraksa**	**Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum**	**100 Persen**	**258.574.000,00**		**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Kecamatan Tigaraksa**	**Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum**	**100 Persen**	**218.424.000,00**	
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		*Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti kecamatan Tigaraksa*	100 Persen	**258.574.000,00**		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		*Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti kecamatan Tigaraksa*	100 Persen	**218.424.000,00**	
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan						Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan					
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	258.574.000,00				*Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan*	12 Laporan	218.424.000,00	
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**Kecamatan Tigaraksa**	**Prosentase Program Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum**	**100 Persen**	**528.723.800,00**		**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Kecamatan Tigaraksa**	**Prosentase Program Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum**	**100 Persen**	**456.733.800,00**	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		*Jumlah Orang yang mengikuti pembinaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah terlaksananya pembinaan Penyelenggaraan Urusan*	100 Orang	528.723.800,00		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		*Jumlah Orang yang mengikuti pembinaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah terlaksananya pembinaan Penyelenggaraan Urusan*	100 Orang	**456.733.800,00**	

		Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah					*Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah*				
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia						Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia					

		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	50 Orang	376.463.800,00				*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia*	50 Orang	320.411.800,00	
Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional						Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional					
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	50 Orang	49.270.000,00				*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional*	50 Orang	33.742.000,00	

Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan						Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan					
		Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	13 Dok	102.990.000,00				*Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan*	13 Dok	102.580.000,00	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**Kecamatan Tigaraksa**	**Persentase pemenuhan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**	**100 Persen**	**178.578.000,00**		**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Kecamatan Tigaraksa**	**Persentase pemenuhan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**	**100 Persen**	**168.838.000,00**	
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		*Prosentase Desa dengan Laporan Keuangan Baik*	100 Persen	178.578.000,00		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		*Prosentase Desa dengan Laporan Keuangan Baik*	100 Persen	168.838.000,00	
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa						Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa					
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 Dokumen	41.850.000,00				*Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa*	12 Dokumen	41.850.000,00	
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa						Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa					
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12 Dokumen	19.650.000,00				*Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa*	12 Dokumen	16.260.000,00	

Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa						Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				
		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0	0,00				*Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa*	0	0,00	
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa						Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa					
		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	12 Dokumen	36.260.000,00				*Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa*	12 Dokumen	30.454.000,00	
Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa						Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa					
		Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1 Dokumen	20.902.000,00				*Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa*	1 Dokumen	20.842.000,00	
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa						Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa					
		Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	2 Dokumen	21.402.000,00				*Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa*	2 Dokumen	20.918.000,00	

Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya						Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya					
		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	4 Laporan	38.514.000,00				*Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya*	4 Laporan	38.514.000,00	
KELURAHAN TIGARAKSA				**2.217.663.520,00**		**KELURAHAN TIGARAKSA**				**2.124.293.520,00**	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Kelurahan Tigaraksa**	**Presentase pemeliharaan fasilitas umum yang dipelihara**	**99 persen**	**1.620.872.720,00**		**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Kelurahan Tigaraksa**	**Presentase pemeliharaan fasilitas umum yang dipelihara**	**99 persen**	**1.609.552.720,00**	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		*Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar Kecamatan Tigaraksa*	100 Persen	**1.268.829.610,00**		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		*Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar Kecamatan Tigaraksa*	100 Persen	**1.257.509.610,00**	
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan						Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1.268.829.610,00				*Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	1 Laporan	1.257.509.610,00	
Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum		*Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik Kecamatan Tigaraksa*	159 Unit	**352.043.110,00**		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum		*Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik Kecamatan Tigaraksa*	159 Unit	**352.043.110,00**	

Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta						Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta					
		Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta	2 Unit	352.043.110,00				*Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta*	2 Unit	352.043.110,00	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Kelurahan Tigaraksa**	**Persentase pemenuhan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan**	**87,00 Persen**	**490.800.800,00**		**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kelurahan Tigaraksa**	**Persentase pemenuhan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan**	**87,00 Persen**	**436.200.800,00**	
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		*Jumlah Dokumen Kegaitan Pemberdayaan Kelurahan*	2 Dokumen	**490.800.800,00**		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		-	-	**436.200.800,00**	
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	490.800.800,00				*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*	2 Pokmas / Ormas	436.200.800,00	
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Kelurahan Tigaraksa**	**Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum**	**100 Persen**	**105.990.000,00**		**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Kelurahan Tigaraksa**	**Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum**	**100 Persen**	**78.540.000,00**	

Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		*Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti kecamatan Tigaraksa*	100 Persen	**105.990.000,00**		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		*Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti kecamatan Tigaraksa*	100 Persen	**78.540.000,00**	
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan						Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan					
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	105.990.000,00				*Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan*	12 Laporan	78.540.000,00	
KELURAHAN KADU AGUNG				**2.338.067.485,00**		**KELURAHAN KADU AGUNG**				**2.242.688.146,00**	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Kelurahan Kaduagung**	**Presentase pemeliharaan fasilitas umum yang dipelihara**	**99 Persen**	**1.742.979.066,00**		**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Kelurahan Kaduagung**	**Presentase pemeliharaan fasilitas umum yang dipelihara**	**99 Persen**	**1.687.330.066,00**	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		*Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar Kecamatan Tigaraksa*	100 Persen	**1.095.768.442,00**		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		*Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar Kecamatan Tigaraksa*	100 Persen	**1.040.119.442,00**	

Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan						Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1.095.768.442,00				*Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	1 Laporan	1.040.119.442,00	
Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum		*Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik Kecamatan Tigaraksa*	159 unit	**647.210.624,00**		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum		*Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik Kecamatan Tigaraksa*	159 unit	**647.210.624,00**	
Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta						Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta					
		Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta	2 Unit	647.210.624,00				*Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta*	2 Unit	647.210.624,00	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Kelurahan Kaduagung**	**Persentase pemenuhan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan**	**87,00 Persen**	**452.780.000,00**		**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kelurahan Kaduagung**	**Persentase pemenuhan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan**	**87,00 Persen**	**429.120.000,00**	
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		*Jumlah Dokumen Kegaitan Pemberdayaan Kelurahan*	2 Dokumen	**452.780.000,00**		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		-	-	**429.120.000,00**	
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					

		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	452.780.000,00				*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*	2 Pokmas / Ormas	429.120.000,00	
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Kelurahan Kaduagung**	**Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum**	**100 Persen**	**142.308.419,00**		**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Kelurahan Kaduagung**	**Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum**	**100 Persen**	**126.238.080,00**	
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		*Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti kecamatan Tigaraksa*	100 Persen	**142.308.419,00**		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		*Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti kecamatan Tigaraksa*	100 Persen	**126.238.080,00**	
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan						Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan					
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	142.308.419,00				*Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan*	12 Laporan	126.238.080,00	
				34.795.485.273,00						**34.524.167.304,00**	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kecamatan Tigaraska merupakan salah satu perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pemerintahan yang mengemban misi dari Kabupaten Tangerang yaitu : Meningkatkan penerapan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat menuju masyarakat yang religius. Dan Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan dan akuntabel.

Berikut hasil penelaahan program dan kegiatan masyarakat di wilayah pemerintahan Kecamatan Tigaraksa untuk tahun 2025:

Tabel 2.4
Usulan Program Dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
KABUPATEN TANGERANG

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Tigaraksa

No	Program/Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberian Bantuan Sarana dan Prasarana UMKM (Alat Pembuatan Kue Semprong)	RT 02/ 01Desa Cisereh	Persentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	1 Paket	
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberian Bantuan Sarana dan Prasarana UMKM (Alat Pembuatan Kue Rengginang)	RT 08/03 Desa Cisereh	Persentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	1 Paket	
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberian Bantuan Sarana dan Prasarana UMKM (Kerajinan Keset)	Kp. Bungureun. 001/001	Persentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	1 Paket	
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberian Bantuan Sarana dan Prasarana UMKM (Grobak Gorengan)	Desa Margasari	Persentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	10 Unit	
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberian Bantuan Sarana dan Prasarana UMKM (Pengrajin Tape)	Kp. Cipayaeun Rt. 012/005 Desa Tegalsari	Persentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	5 Kelompok	
6	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pengadaan Tenda Kerucut Untuk UMKM	Desa Pasirbolang	Persentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	10 unit	

7	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberian Bantuan Sarana dan Prasarana UMKM (Grobak)	Desa Cileles	Persentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	10 Unit	
8	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pengadaan sarana prasarana kerajinan pembuatab sangkar burung, cangklong, dan madu odeng	Kel Kaduagung	Persentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	1 Paket	
9	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pengadaan sarana prasarana bank sampah kadu agung sukses bersama dan kelompok wanita tani kelurahan kadu agung	Kel Kaduagung	Persentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	1 Paket	
10	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PENGADAAN BIBIT TANAMAN PRODUKTIF (RAMBUTAN PARAKAN) GREEN VILLAGE	RT 002, RT 004 Desa Sodong	Persentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	1500 BIBIT	
11	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pembudidayaan Domba Garut	Desa Cisereh	Persentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	50 Ekor	
12	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberian Bantuan Sarana dan Prasarana UMKM (Pembuatan Kursi, Wastafle Dari Bahan Drum)	Perum Puri Permai II RT02/RW06 Desa Pete	Persentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	1 Paket	
13	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PENGADAAN BIBIT IKAN NILA, KOLAM SEMI PERMANEN, DAN KELENGKAPAN LAINNYA	KP. SERDANG RT. 002/003 DESA MATAGARA	Persentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	1 PAKET	

14	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pengadaan Sarana dan Prasarana KWT dan Bank Sampah	Puri Permai 1 Rw. 005 Desa Pete	Persentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	2 unit	
15	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Peternakan Ayam Petelor	Rt. 003/001 Desa Pematang	Persentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	1000	
16	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PENGADAAN ALAT-ALAT PERTANIAN AGROWISATA BISNIS DESA SODONG	RT. 002/004 Desa Sodong	Persentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	1 paket	
17	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pengadaan Budi Daya Kambing	Kp. Tapos Rt. 012/004 Desa Tapos	Persentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	75 ekor	
18	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pelatihan Budidaya Ternak Lele	Rt. 004/004 Kelurahan Tigaraksa	Persentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	1 Kelompok	
19	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Peningkatan Jalan Poros Desa Cisereh - Ciapus (Cangkudu Balaraja)	Kp. Cisereh Sabrang Rt. 003/001 Desa Cisereh	Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara	3 x 500 m	
20	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Lanjutan Peningkatan Betonisasi Jalan Kp. Cipayaeun menuju Makam Buyut Attin	Rt. 007/005 Desa Tegalsari	Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara	500 x 3 m	

21	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Peninggian Jalan Poros Desa Betonisasi (Pasirbolang-Pematang)	Kp. Seglog Rt. 001/002 Desa Pasir Bolang	Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara	64 m2 x 4 m2 x 80 cm	
22	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Peningkatan Lanjutan Betonisasi Jalan Sikluk Picung	Rt. 002/001 Desa Pematang	Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara	700 m x 3.5 m	
23	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	LANJUTAN PENINGKATAH JALAN LINGKUNGAN (RABAT BETON)	Rt. 002/004 Desa Sodong	Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara	3 x 500 m	
24	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN SWAKARYA (RABAT BETON)	Rt. 005/004 dan RT. 002/004 Desa Sodong	Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara	3 x 500 m	
25	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Lanjutan Betonisasi Kp. Namprak	Rt. 002/004 Desa Bantarpanjang	Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara	200 m x 3 m	
26	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Lanjutan Pembangunan Jalan (Betonisasi) Kp. Barahat Adiyasa	Kp. Barahat-Gardu Rt. 003/006 Desa Cileles	Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara	300 x 4 m	
27	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PEMBANGUNAN BETONISASI JALAN POROS KP. MAMPELEM RW. 05 - KP. SAREDANG RW. 03	Kp. MAMPELEM RW. 05 DESA MATAGARA	Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara	4 m X 450 m	

28	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PEMBANGUNAN JEMBATAN JALAN POROS KP. MAMPELEM RW. 05 - KP. SAREDANG RW. 04	KP. SERDANG RW. 03 DESA MATAGARA	Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara	4 m X 4 m	
29	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pembangunan Pedestrian Jalan Aria Jaya Sentika	Tigaraksa	Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara	1 Paket	
30	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pembangunan Gapura Perbatasan Bantarpanjang-Tenjo	Rt. 002/002 Desa Bantarpanjang	Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara	1 paket	
31	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Penataan Perkantoran Kecamatan Tigaraksa (UMKM, Perpustakaan, UPT, PKK, Kepemudaan)	Tigaraksa	Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara	1 paket	
32	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Gg. Masjid arah Sodong Kp. Pabuaran belakang RSUD Tigaraksa (Paving Blok)	Rt. 002/002 Kelurahan Tigaraksa	Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara	150 x 2 m	
33	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pembangunan Gedung Puskesmas Pasirnangka	Tigaraksa	Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara	1 Paket	
34	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pembangunan Posyandu (Fasum Perum Mustika)	Rw. 008 Desa Pasir Nangka	Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara	1 unit	

35	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rehab Berat SDN Kaduagung 1	RT. 001/004	Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara	1 Paket	
36	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tambahan Ruang Kelas, Perpustakaan dan UKS SDN Cisereh I	Kp. Cisereh Rt. 001/001 Desa Cisereh	Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara	3 unit	
37	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Sarana Air Bersih SDN Seglog	SDN Seglog Desa Pasirbolang	Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara	1 paket	
38	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Penambahan Ruang Kelas Baru SDN Bidara	Rt. 002/004 Desa Pematang	Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara	3 Kelas	
39	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pembangunan Ruang Guru SDN Tapos Wetan	Kp. Tapos Rt. 016/006 Desa Tapos	Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara	1 Unit	
40	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Penambahan Ruang Kelas SDN Cigaling	Kp. Bantarpanjang Rt. 004/005 Desa Cileles	Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara	4 unit	
41	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rehabilitasi Ruang Kelas SMP N 2 Tigaraksa	Tigaraksa	Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara	1 unit	
42	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Relokasi TK Negeri Pertiwi	Tigaraksa	Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara	1 Paket	

43	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pekerjaan Rehab Berat SDN Kadeper	Tigaraksa	Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara	8 X 7 M 2 (4 Ruang)	
44	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pengadaan mebeuler SDN Sodong I	Tigaraksa	Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara	40 Set	
45	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pengadaan mebeuler SDN Jalupang	Tigaraksa	Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara	40 Set	
46	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pekerjaan Rehab Berat SDN Guradog	Tigaraksa	Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara	8 m X 8 m X 3 Ruang	
47	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	SDN Bantar Panjang	RT 03/05 Desa Bantar Panjang	Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara	4 Unit	
48	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pengadaan moubiler Kursi dan meja siswa SDN Tigaraksa 01	Tigaraksa	Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara	3 ruang X 40	
49	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pengadaan moubiler Kursi dan meja siswa SDN Cisereh II	Cisereh	Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara	3 ruang X 40	

50	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pembangunan Balai Warga	Kp. Tapos Rw. 001 s.d Rw. 006 Desa Tapos	Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara	6 Unit	

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGAKAT DAERAH

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil guna mencapai sasaran tertentu. Program kerja Kecamatan Tigaraksa tahun 2025 disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat dan kegiatan rutin kecamatan yang diusulkan dan terangkum dalam pelaksanaan musrenbang tingkat kecamatan kemudian di usulkan pada musrenbang tingkat kabupaten yang disesuaikan dengan permendagri nomor 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Faktor yang menjadi pertimbangan terhadap rumusan program dan kegaiatan yaitu selaras dengan tupoksi Kecamatan Tigaraksa serta demi pencapaian misi Kabuapten Tangerang yaitu ***Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik, Demokratis Dan Partisipatif*** dan dengan mempertimbangkan pencapaian IKM Kecamatan Tigaraksa.

Secara keseluruhan rumusan program dan kegaitan ini sudah sesuai dengan apa yang ada di rancangan awal RKPD baik jenis program dan kegaitan serta pagu indikatif yang ada di Kecamatan Tigaraksa

Rekapitulasi Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Tigaraksa Tahun 2025 yaitu terdiri dari 6 Program, 14 Kegiatan dan 40 Sub Kegiatan, yaitu:

Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program dan Kegaitan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Kabupaten Tangerang

Nama Perangkat Darerah : Kecamatan Tigaraksa

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025				Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Lokasi	TARGET PERUBAHAN 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	Sumber Dana		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	KECAMATAN TIGARAKSA				**34.524.167.304,00**				**19.938.247.285,00**	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**34.524.167.304,00**				**19.938.247.285,00**	
7.01	**KECAMATAN**				**30.157.185.638,00**				**19.938.247.285,00**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Kec. Tigaraksa**	**Kecamatan Tigaraksa**	**100 Persen**	**13.493.321.745,00**	**APBD**	Penyesuaian Gaji Dan Tunjangan Dan Honor Non ASN		**12.705.601.785,00**	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah kecamatan Tigaraksa*		100 Persen	168.446.000,00				333.000.500,00	KECAMATAN TIGARAKSA
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		4 Dokumen	68.270.000,00				187.112.500,00	KECAMATAN TIGARAKSA

7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		4 Laporan	37.016.000,00				52.004.000,00	KECAMATAN TIGARAKSA
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		4 Laporan	63.160.000,00				93.884.000,00	KECAMATAN TIGARAKSA
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah kecamatan Tigaraksa*		100 Persen	9.947.696.621,00				9.227.439.285,00	KECAMATAN TIGARAKSA
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		38 Orang/bulan	9.911.092.621,00				9.175.447.285,00	KECAMATAN TIGARAKSA
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									

		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		18 Laporan	36.604.000,00				51.992.000,00	KECAMATAN TIGARAKSA
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian kecamatan Tigaraksa*		100 Persen	99.033.000,00				170.000.000,00	KECAMATAN TIGARAKSA
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		35 Paket	38.470.000,00				40.000.000,00	KECAMATAN TIGARAKSA
7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan									
		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		38 Orang	60.563.000,00				130.000.000,00	KECAMATAN TIGARAKSA
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan administrasi umum kecamatan Tigaraka*		100 Persen	474.966.400,00				925.000.000,00	KECAMATAN TIGARAKSA
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi									

	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		5 Paket	24.868.300,00				25.000.000,00	KECAMATAN TIGARAKSA
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		10 Paket	88.362.000,00				300.000.000,00	KECAMATAN TIGARAKSA
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		5 Paket	27.930.900,00				100.000.000,00	KECAMATAN TIGARAKSA
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		2 Paket	52.525.200,00				60.000.000,00	KECAMATAN TIGARAKSA
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		2 Paket	70.484.000,00				150.000.000,00	KECAMATAN TIGARAKSA
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									

		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		4 Dokumen	60.000.000,00				20.000.000,00	KECAMATAN TIGARAKSA
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		4 Laporan	100.050.000,00				150.000.000,00	KECAMATAN TIGARAKSA
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 Laporan	50.746.000,00				120.000.000,00	KECAMATAN TIGARAKSA
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pemenuhan jasa penunjang kecamatan Tigaraksa*		100 Persen	1.436.188.174,00				1.335.162.000,00	KECAMATAN TIGARAKSA
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1 Laporan	7.490.000,00				15.162.000,00	KECAMATAN TIGARAKSA
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	250.409.606,00				250.000.000,00	KECAMATAN TIGARAKSA

7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	1.178.288.568,00				1.070.000.000,00	KECAMATAN TIGARAKSA
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah kecamatan Tigaraksa*		100 Persen	1.366.991.550,00				715.000.000,00	KECAMATAN TIGARAKSA
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		12 Unit	114.054.976,00				126.000.000,00	KECAMATAN TIGARAKSA
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		12 Unit	343.093.674,00				72.000.000,00	KECAMATAN TIGARAKSA

7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		12 Unit	17.000.000,00				17.000.000,00	KECAMATAN TIGARAKSA
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		5 Unit	892.842.900,00				500.000.000,00	KECAMATAN TIGARAKSA
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase pemeliharaan fasilitas umum yang terpelihara**	**Kecamatan Tigaraksa**	100	**14.416.705.593,00**	**APBD**			**1.839.845.500,00**	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar Kecamatan Tigaraksa*		99	**49.110.000,00**				50.000.000,00	KECAMATAN TIGARAKSA
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan									
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada		1 Laporan	49.110.000,00				50.000.000,00	KECAMATAN TIGARAKSA

		Masyarakat di Wilayah Kecamatan								
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	*Jml infrastruktur yang dipelihara*		160 unit	**14.344.035.593,00**				1.699.845.500,00	KECAMATAN TIGARAKSA
7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum									
		Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum		160 Dok	14.344.035.593,00				1.699.845.500,00	KECAMATAN TIGARAKSA
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan*		3 Laporan	23.560.000,00				90.000.000,00	KECAMATAN TIGARAKSA
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan									
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		3 Laporan	23.560.000,00				90.000.000,00	KECAMATAN TIGARAKSA
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN**	**Persentase pemenuhan**	**Kecamatan**	**87,00 Persen**	**1.403.162.500,00**	**APBD**			**1.124.000.000,00**	

	MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan**	**Tigaraksa**							
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan Kecamatan Tigaraksa*		87 Persen	**1.403.162.500,00**				1.124.000.000,00	KECAMATAN TIGARAKSA
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa									
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		10 Lembaga Kemasyarakatan	110.490.000,00				124.000.000,00	KECAMATAN TIGARAKSA
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan									
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		12 Laporan	1.292.672.500,00				1.000.000.000,00	KECAMATAN TIGARAKSA
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum**	**Kecamatan Tigaraksa**	**100 Persen**	**218.424.000,00**	**APBD**			**350.000.000,00**	

7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti kecamatan Tigaraksa*		100 Persen	218.424.000,00				350.000.000,00	KECAMATAN TIGARAKSA
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan									
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		12 Laporan	218.424.000,00				350.000.000,00	KECAMATAN TIGARAKSA
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Prosentase Program Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum**	**Kecamatan Tigaraksa**	**100 Persen**	**456.733.800,00**	**APBD**			**200.000.000,00**	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Jumlah Orang yang mengikuti pembinaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah terlaksananya pembinaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah*		100 Orang	456.733.800,00				200.000.000,00	KECAMATAN TIGARAKSA

7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia									
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara		50 Orang	320.411.800,00				50.000.000,00	KECAMATAN TIGARAKSA

		Kesatuan Republik Indonesia								
7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional									
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional		50 Orang	33.742.000,00				50.000.000,00	KECAMATAN TIGARAKSA
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan									
		Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		13 Dok	102.580.000,00				100.000.000,00	KECAMATAN TIGARAKSA
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase pemenuhan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**	**Kecamatan Tigaraksa**	**100 Persen**	**168.838.000,00**				**159.000.000,00**	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan	*Prosentase Desa dengan Laporan Keuangan Baik*		100 Persen	168.838.000,00				159.000.000,00	KECAMATAN TIGARAKSA

	Pengawasan Pemerintahan Desa									
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa									
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa		12 Dokumen	41.850.000,00				30.000.000,00	KECAMATAN TIGARAKSA
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa									
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		12 Dokumen	16.260.000,00				20.000.000,00	KECAMATAN TIGARAKSA
7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa									
		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa		0	0,00				0,00	KECAMATAN TIGARAKSA
7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa									
		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan		12 Dokumen	30.454.000,00				25.000.000,00	KECAMATAN TIGARAKSA

		Permusyawaratan Desa								
7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa									
		Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa		1 Dokumen	20.842.000,00				22.000.000,00	KECAMATAN TIGARAKSA
7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa									
		Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa		2 Dokumen	20.918.000,00				22.000.000,00	KECAMATAN TIGARAKSA
7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya									
		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya		4 Laporan	38.514.000,00				40.000.000,00	KECAMATAN TIGARAKSA
	KELURAHAN TIGARAKSA		**KELURAHAN TIGARAKSA**		**2.124.293.520,00**				**1.850.760.000,00**	
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Presentase pemeliharaan fasilitas umum yang dipelihara**	**Kelurahan Tigaraksa**	**99 persen**	**1.609.552.720,00**	**APBD**			**1.320.760.000,00**	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan	*Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan*		100 Persen	1.257.509.610,00				1.020.760.000,00	KECAMATAN TIGARAKSA

	oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*standar Kecamatan Tigaraksa*								
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan									
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		1 Laporan	1.257.509.610,00				1.020.760.000,00	KECAMATAN TIGARAKSA
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	*Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik Kecamatan Tigaraksa*		159 Unit	352.043.110,00				300.000.000,00	KECAMATAN TIGARAKSA
7.01.02.2.03.0002	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta									
		Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta		2 Unit	352.043.110,00				300.000.000,00	KECAMATAN TIGARAKSA
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase pemenuhan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan**	**Kelurahan Tigaraksa**	**87,00 Persen**	**436.200.800,00**	**APBD**			**400.000.000,00**	

7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Dokumen Kegaitan Pemberdayaan Kelurahan*		2 Dok	436.200.800,00				400.000.000,00	KECAMATAN TIGARAKSA
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		2 Pokmas / Ormas	436.200.800,00				400.000.000,00	KECAMATAN TIGARAKSA
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum**	**Kelurahan Tigaraksa**	**100 Persen**	**78.540.000,00**	**APBD**			**130.000.000,00**	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti kecamatan Tigaraksa*		100 Persen	78.540.000,00				130.000.000,00	KECAMATAN TIGARAKSA
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan									
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		12 Laporan	78.540.000,00				130.000.000,00	KECAMATAN TIGARAKSA
	KELURAHAN KADU AGUNG		**KELURAHAN KADU AGUNG**		**2.242.688.146,00**				**1.709.040.000,00**	

7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Presentase pemeliharaan fasilitas umum yang dipelihara**	**Kelurahan Kaduagung**	**99 Persen**	**1.687.330.066,00**	**APBD**			**1.179.040.000,00**	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar Kecamatan Tigaraksa*		100 Persen	1.040.119.442,00				879.040.000,00	KECAMATAN TIGARAKSA
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan									
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		1 Laporan	1.040.119.442,00				879.040.000,00	KECAMATAN TIGARAKSA
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	*Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik Kecamatan Tigaraksa*		159 unit	647.210.624,00				300.000.000,00	KECAMATAN TIGARAKSA
7.01.02.2.03.0002	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta									
		Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum		2 Unit	647.210.624,00				300.000.000,00	KECAMATAN

		yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta								TIGARAKSA
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase pemenuhan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan**	**Kelurahan Kaduagung**	**87,00 Persen**	**429.120.000,00**	**APBD**			**400.000.000,00**	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Dokumen Kegaitan Pemberdayaan Kelurahan*		2 Dok	429.120.000,00				400.000.000,00	KECAMATAN TIGARAKSA
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		2 Pokmas / Ormas	429.120.000,00				400.000.000,00	KECAMATAN TIGARAKSA
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum**	**Kelurahan Kaduagung**	**100 Persen**	**126.238.080,00**	**APBD**			**130.000.000,00**	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti kecamatan Tigaraksa*		100 Persen	126.238.080,00				130.000.000,00	KECAMATAN TIGARAKSA
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan									
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian		12 Laporan	126.238.080,00				130.000.000,00	KECAMATAN

		Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan								TIGARAKSA
					34.524.167.304,00				**19.938.247.285,00**	

Tabel 3.2
Rencana Kerja Dan Pendanaan Perubahan Kecamatan Tigaraksa Tahun 2025

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025		Keterangan
			TARGET PERUBAHAN 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	
	KECAMATAN TIGARAKSA			**34.524.167.304,00**	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**			**34.524.167.304,00**	
7.01	**KECAMATAN**			**30.157.185.638,00**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Kec. Tigaraksa**	**100 Persen**	**13.493.321.745,00**	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah kecamatan Tigaraksa*	100 Persen	168.446.000,00	
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	68.270.000,00	Ketidak Sesuaian Target Dengan Renstra 2024-2026 Karena Penyesuaian Target Dengan Kebutuhan Di Tahun 2025
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	37.016.000,00	
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	63.160.000,00	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah kecamatan Tigaraksa*	100 Persen	9.947.696.621,00	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	38 Orang/bulan	9.911.092.621,00	
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	36.604.000,00	Ketidak Sesuaian Target Dengan Renstra 2024-2026 Karena Penyesuaian Target Dengan Kebutuhan Di Tahun 2025
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian kecamatan Tigaraksa*	100 Persen	99.033.000,00	
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	35 Paket	38.470.000,00	Ketidak Sesuaian Target Dengan Renstra 2024-2026 Karena Penyesuaian Target Dengan Kebutuhan Di Tahun 2025
7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				
		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	38 Orang	60.563.000,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan administrasi umum kecamatan Tigaraka*	100 Persen	474.966.400,00	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi				

	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	24.868.300,00	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	88.362.000,00	
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	27.930.900,00	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	52.525.200,00	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	70.484.000,00	
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	60.000.000,00	
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	100.050.000,00	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	50.746.000,00	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pemenuhan jasa penunjang kecamatan Tigaraksa*	100 Persen	1.436.188.174,00	
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	7.490.000,00	Ketidak Sesuaian Target Dengan Renstra 2024-2026 Karena Penyesuaian Target Dengan Kebutuhan Di Tahun 2025
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	250.409.606,00	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.178.288.568,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah kecamatan Tigaraksa*	100 Persen	1.366.991.550,00	
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Unit	114.054.976,00	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	343.093.674,00	
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	17.000.000,00	

7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	892.842.900,00	
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase pemeliharaan fasilitas umum yang terpelihara**	100	**14.416.705.593,00**	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar Kecamatan Tigaraksa*	99	49.110.000,00	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	49.110.000,00	
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	*Jml infrastruktur yang dipelihara*	160 unit	14.344.035.593,00	
7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				
		Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	160 Dok	14.344.035.593,00	Ketidak Sesuaian Target Dengan Renstra 2024-2026 Karena Penyesuaian Target Dengan Kebutuhan Di Tahun 2025
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan*	3 Laporan	23.560.000,00	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	3 Laporan	23.560.000,00	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase pemenuhan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan**	**87,00 Persen**	**1.403.162.500,00**	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan Kecamatan Tigaraksa*	87 Persen	1.403.162.500,00	
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10 Lembaga Kemasyarakatan	110.490.000,00	
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	1.292.672.500,00	Ketidak Sesuaian Target Dengan Renstra 2024-2026 Karena Penyesuaian Target Dengan Kebutuhan Di Tahun 2025
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum**	**100 Persen**	**218.424.000,00**	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti kecamatan Tigaraksa*	100 Persen	218.424.000,00	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional	12 Laporan	218.424.000,00	

		Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Prosentase Program Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum**	**100 Persen**	**456.733.800,00**	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Jumlah Orang yang mengikuti pembinaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah terlaksananya pembinaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah*	100 Orang	456.733.800,00	
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	50 Orang	320.411.800,00	
7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	50 Orang	33.742.000,00	
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				
		Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	13 Dok	102.580.000,00	Ketidak Sesuaian Target Dengan Renstra 2024-2026 Karena Penyesuaian Target Dengan Kebutuhan Di Tahun 2025
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase pemenuhan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**	**100 Persen**	**168.838.000,00**	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Prosentase Desa dengan Laporan Keuangan Baik*	100 Persen	168.838.000,00	
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa				
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 Dokumen	41.850.000,00	
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12 Dokumen	16.260.000,00	
7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				
		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0	0,00	

7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa				
		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	12 Dokumen	30.454.000,00	
7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa				
		Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1 Dokumen	20.842.000,00	
7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				
		Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	2 Dokumen	20.918.000,00	
7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				
		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	4 Laporan	38.514.000,00	
	KELURAHAN TIGARAKSA			**2.124.293.520,00**	
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Presentase pemeliharaan fasilitas umum yang dipelihara**	**99 persen**	**1.609.552.720,00**	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar Kecamatan Tigaraksa*	100 Persen	1.257.509.610,00	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1.257.509.610,00	
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	*Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik Kecamatan Tigaraksa*	159 Unit	352.043.110,00	
7.01.02.2.03.0002	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta				
		Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta	2 Unit	352.043.110,00	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase pemenuhan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan**	**87,00 Persen**	**436.200.800,00**	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Dokumen Kegaitan Pemberdayaan Kelurahan*	*2 Dok*	436.200.800,00	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	436.200.800,00	
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum**	**100 Persen**	**78.540.000,00**	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti kecamatan Tigaraksa*	100 Persen	78.540.000,00	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	78.540.000,00	
	KELURAHAN KADU AGUNG			**2.242.688.146,00**	
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Presentase pemeliharaan fasilitas umum yang dipelihara**	**99 Persen**	**1.687.330.066,00**	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit	*Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan*	100 Persen	1.040.119.442,00	

	Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*standar Kecamatan Tigaraksa*			
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1.040.119.442,00	
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	*Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik Kecamatan Tigaraksa*	159 unit	647.210.624,00	
7.01.02.2.03.0002	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta				
		Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta	2 Unit	647.210.624,00	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase pemenuhan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan**	**87,00 Persen**	**429.120.000,00**	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Dokumen Kegaitan Pemberdayaan Kelurahan*	*2 Dok*	429.120.000,00	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	429.120.000,00	
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum**	**100 Persen**	**126.238.080,00**	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti kecamatan Tigaraksa*	100 Persen	126.238.080,00	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	126.238.080,00	
				34.524.167.304,00	

Tabel diatas merupakan rencana kerja perubahan kecamatan tigaraska pada tahun 2025, adapun ketidak sesuaian dengan renstra 2024-2026 terkait anggaran dan target kinerja dikarenakan disesuaikannya dengan kebutuhan tahun 2025.

BAB IV
PENUTUP

Renja Perubahan Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang Tahun 2025 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja Perubahan ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Renja Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang Tahun 2025 antara lain:

1. Perumusan program dan kegiatan beserta indikatornya pada Renja Perubahan Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tangerang;

2. Penyusunan Renja Perubahan Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang ini berpedoman pada Renstra Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2025 telah termuat dalam Renja Perubahan. Selain itu terdapat penambahan output/ keluaran kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang;

3. Penyusunan Renja Perubahan Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang ini juga berpedoman pada RKPD Perubahan Kabupaten Tangerang Tahun 2025, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Renja Perubahan Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Renja Perubahan Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang ini akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan yang ada di Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang;

Renja Perubahan ini dapat dilaksanakan dengan baik agar target yang sudah ditetapkan dapat tercapai.

c. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Renja Perubahan Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang Tahun 2025 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Renja Perubahan Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang Tahun 2024 untuk setiap triwulannya.

Selanjutnya program dan kegiatan pada Renja Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang Tahun 2025 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja Perubahan ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan stakeholder pembangunan di Kabupaten

Tangerang. Dengan disusunnya Renja Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang Tahun 2025 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Renja Perubahan ini juga diharapkan dapat menjadi acuan / pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang pada Tahun Anggaran 2025.

33. Kecamatan Cikupa

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan kepada setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun, dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan dalam Renstra PD ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Renja PD, dalam hal ini Renja Kecamatan Cikupa, mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, mengingat Renja Kecamatan Cikupa merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari Visi, Misi dan Program Kecamatan Cikupa, sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah.

Renja merupakan dasar atau acuan memasukkan program kegiatan ke dalam KUA dan PPAS, dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA-P) Tahun 2025. Selain itu, Renja merupakan alat untuk evaluasi pelaksanaan program kegiatan instansi, untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Mengingat arti strategis dokumen Renja PD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka dalam proses penyusunan hingga penetapan dokumen Renja PD mengikuti tata cara dan alur penyusunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

Seiring hal tersebut di atas, dalam penyusunan rancangan Renja PD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja SKPD dapat dikerjakan secara paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan melihat kondisi terkini dari PD, evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra PD.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembar Negara Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4578);
14. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

16. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 33 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan; dan
17. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 39 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Kantor Kecamatan Cikupa adalah menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program, dan kegiatan yang menjadi tolak ukur dan alat bantu bagi unit-unit kerja yang ada pada lingkungan Kecamatan Cikupa untuk secara konsekuen dan konsisten menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Tujuan dari Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Kantor Kecamatan Cikupa adalah guna merumuskan program dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kantor Kecamatan Cikupa Tahun 2024.

1.4. Sistematika

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja PD, proses penyusunan Renja PD, keterkaitan antara Renja PD dengan dokumen RKPD, Renstra PD, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan PD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran PD.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja PD.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja PD, serta susunan garis besar isi.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Cikupa

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD sampai dengan triwulan II, mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja PD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra PD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya.

2.2 Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan

Telaahan anggaran dan Kinerja terhadap Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Triwulan II.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat kajian tentang Rencana Kerja Perubahan dan pendaan pada Perangkat Daerah Kecamatan Cikupa tahun 2025.

BAB IV PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Cikupa

Tahun 2025 merupakan Perjalanan tahun dari pelaksanaan Renstra Kecamatan Cikupa (Renstra 2024-2026), Akuntabilitas Kinerja mempunyai makna sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Stratejik (RENSTRA) Instansi. Untuk mengukur keberhasilan tujuan dan sasaran strategis organisasi, secara umum Kemantren memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU).

Indikator Kinerja Utama atau Sasaran Strategis Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang Tahun 2025 adalah:

1. Meningkatnya pelayanan publik sesuai dengan standar kecamatan yang diukur dengan Indikator ”Hasil indeks Kepuasan Masyarakat”. Pada tahun 2024 target indeks Kepuasan Masyarakat 98,15 dan Capaian Sebebsar 80,75 dengan demikian di tahun 2024 belum tercapai dan tahun 2025 masih berjalan untuk penilaian.
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan yang diukur dengan Indikator “Nilai AKIP Kecamatan Cikupa”. Pada tahun 2024

Tabel 2.1
Capaian Kinerja Kecamatan Cikupa Tahun 2024

Sasaran Kecamatan Cikupa	Indikator	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Keterangan
Meningkatnya pelayanan publik sesuai dengan standar kecamatan	Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat	98,15	80,75	Belum Tercapai
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan (Nilai AKIP)	Nilai AKIP Kecamatan Cikupa	75,05	60.20	Belum Tercapai

Pada tabel di atas dua sasaran yang tidak mencapai target atau realisasi pencapaian di bawah target yang sudah ditentukan. Realisasi Sasaran yang tidak mencapai target yaitu Meningkatnya pelayanan masyarakat dan Meningkatnya Akuntibilitas Kinerja Kecamatan, adapun beberapa faktor yang pempengaruhi tidak tercapaianya target tersebut, beberapa faktor tersebut yaitu:

1. Ketidakpahaman masyarakat dalam mengisi Survey Kepuasan Masyarakat yang sudah disediakan oleh Kecamatan Cikupa,
2. Kurangnya Sumber Daya Manusia dalam mengarahkan masyarakat untuk mengisi form survey kepuasan masyarakat yang sudah di sediakan,
3. Keterbatasana sarana dan prasarana pelayanan publik dalam penunjang Survey Kepuasan Masyarakat,
4. Tidak sesuaianya isi dalam buku LAKIP Tahun 2024,
5. Beberapa dokumen pemenuhan tidak terpenuhi, dan
6. Keterlambatan dalam menindaklajuti Evaluasi Tahun sebelumnya.

Terhadap saasaran program Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang

Tahun 2025 memiliki 6 Program. Adapun program yang dan sasaran dimaksud adalah:

Tabel 2.2
Program, Target, dan Realisasi Tahun 2024 dan Triwulan II Tahun 2025

Program	Indikator	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Target Tahun 2025	Realisasi Triwulan II Tahun 2025
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	50 Persen
Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar	100 Persen	100 Persen	100 Persen	50 Persen
	Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara	92 Persen	92 Persen	95 persen	45 Persen
Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	78 Persen	78 Persen	85 Persen	40 Persen
Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase laporan trantibum yang di fasilitasi	100 Persen	100 Persen	100 Persen	50 Persen
Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa dengan laporan keuangan dan administrasi baik	90,15 Persen	90,15 Persen	90,25 Persen	45 Persen
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Prosentase Program Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum	100 Persen	100 Persen	100 Persen	50 Persen

2.2 Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan

Keterkaitan pencapaian kinerja program dan kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, sebagaimana yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) bahwa kegiatan-kegiatan secara umum telah dilaksanakan dengan baik. Adapun evaluasi sampai dengan triwulan II (13 Juni) Tahun 2025 dari program, kegiatan, dan sub kegiatan secara rinci sebagai berikut

Tabel 2.3
Target, Realisasi Anggaran, Realisasi Kinerja sd Triwulan II Tahun 2025

Uraian	Indikoator Kinerja	Anggaran			Kinerja	
		Pagu	Realisasi	%	Target	Realisasi
1	2	3	4		5	6
KECAMATAN CIKUPA						
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	10.478.715.470,00	4.152.801.712,00	39,63	100%	50%
PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	310.237.400,00	151.271.000,00	48,76	10 Dokumen	6 Dokumen
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	123.296.400,00	30.960.000,00	25,11	6 Dokumen	3 Dokumen
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	59.971.000,00	59.471.000,00	99,17	1 Dokumen	1 Dokumen
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	126.970.000,00	60.840.000,00	47,92	3 Dokumen	2 Dokumen

ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Jumlah laporan keuangan	7.413.201.175,00	3.091.918.343,00	41,71	1 Laporan	1 Laporan
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	7.297.808.175,00	3.019.217.343,00	41,37	30 Orang	30 Orang
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	115.393.000,00	72.701.000,00	63,00	1 Laporan	1 Laporan
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Jumlah Laporan Pembinaan Pegawai	184.648.500,00	21.510.000,00	11,65	1 Dokumen	1 Dokumen
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	84.659.000,00	21.510.000,00	25,41	40 Orang	40 Orang
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	99.989.500,00	0,00	0,00	40 Orang	40 Orang
ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Jumlah Laporan Administrasi umum (Kelurahan Bunder) Jumlah Laporan Administrasi umum (Kelurahan Sukamulya) Jumlah Laporan Administrasi umum	593.308.494,00	241.158.896,00	40,65	27 Dokumen	13 Dokumen
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	32.530.000,00	32.530.000,00	100,00	5 Paket	5 Paket
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	348.707.594,00	77.057.896,00	22,10	4 Paket	4 Paket
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	79.463.400,00	78.966.500,00	99,37	10 Paket	10 Paket
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	28.283.500,00	28.283.500,00	100,00	6 Paket	6 Paket
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan yang Disediakan	14.688.000,00	4.896.000,00	33,33	2 Paket	2 Paket
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	46.720.000,00	11.680.000,00	25,00	28 Laporan	7 Laporan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	42.916.000,00	7.745.000,00	18,05	2 Dokumen	2 m Dokumen
PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Jumlah Laporan Jasa Penunjang	1.226.783.968,00	513.219.833,00	41,83	3 Dokumen	3 Dokumen
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	268.590.400,00	101.040.833,00	37,62	2 Paket	2 Paket
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	958.193.568,00	412.179.000,00	43,02	10 Dokumen	10 Dokumen
PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Jumalah Laporan pemeliharan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	750.535.933,00	133.723.640,00	17,82	3 Laporan	3 Laporan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	449.295.520,00	102.633.640,00	22,84	5 Unit	5 Unit
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	69.950.000,00	0,00	0,00	6 Unit	6 Unit
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilit asi	231.290.413,00	31.090.000,00	13,44	3 Unit	3 Unit
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar**	126.319.800,00	40.762.600,00	52,03	100%	50%
	Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik	11.500.300.000,00	6.008.460.000,00		95%	45%
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN	**Tersedianya pemenuhan sarana dan prasarana Paten di Kecamatan**	126.319.800,00	40.762.600,00	32,27	2 Dokumen	1 Dokumen
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	**Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan**	126.319.800,00	40.762.600,00	32,27	2 Dokumen	1 Dokumen

	kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					
KOORDINASI PEMELIHARAAN PRASARANA DAN SARANA PELAYANAN UMUM	**Jumlah infrastruktur yang dipelihara**	11.500.300.000,00	6.008.460.000,00	52,25	1 Dokumen	1 Dokumen
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	11.500.300.000,00	6.008.460.000,00	52,25	4 Dokumen	1 Dokumen
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan**	1.815.120.600,00	774.485.634,00	42,67	85%	42%
KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA	**Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan/pemberdayaan**	1.585.802.000,00	721.468.434,00	45,50	6 Dokumen	3 Dokumen
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	101.595.000,00	101.595.000,00	100,00	8 Lembaga	8 Lembaga
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1.484.207.000,00	619.873.434,00	41,76	10 Laporan	5 Laporan
PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN TINGKAT KECAMATAN	Jumlah laporan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	229.318.600,00	53.017.200,00	23,12	2 Dokumen	0 Dokumen
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	229.318.600,00	53.017.200,00	23,12	2 Laporan	0 Laporan
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti**	155.212.000,00	51.973.000,00	33,49	100%	50%
KOORDINASI PENERAPAN DAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH	**Jumlah kegiatan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan**	155.212.000,00	51.973.000,00	33,49	4 Dokumen	2 Dokumen
Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	155.212.000,00	51.973.000,00	33,49	4 Laporan	2 Laporan
PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti**	156.716.000,00	37.725.000,00	24,07	100%	50%
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Jumlah Rekomendasai yang dikeluarkan**	156.716.000,00	37.725.000,00	24,07	50 Rekomendasi	25 Rekomendasi
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	**Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia**	71.421.000,00	31.210.000,00	43,70	50 Orang	50
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	**Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan**	85.295.000,00	6.515.000,00	7,64	50 Orang	

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**Prosentase desa dengan laporan keuangan baik**	164.950.000,00	51.667.000,00	31,32	90,25%	45%
FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**Jumlah Desa yang difasilitasi**	164.950.000,00	51.667.000,00	31,32	12 Desa	12 Desa
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	65.545.000,00	21.210.000,00	32,36	12 Dokumen	12 Dokumen
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	42.617.000,00	15.885.000,00	37,27	12 Dokumen	12 Dokumen
Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	56.788.000,00	14.572.000,00	25,66	12 Laporan	12 Laporan
KELURAHAN SUKAMULYA						
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan**	**344.732.480,00**	**172.139.565,00**	**49,93**	100%	50%
ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Jumlah Laporan Administrasi umum (Kelurahan Bunder) Jumlah Laporan Administrasi umum (Kelurahan Sukamulya) Jumlah Laporan Administrasi umum	**344.732.480,00**	**172.139.565,00**	**49,93**	4 Dokumen	4 Dokumen
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	344.732.480,00	172.139.565,00	49,93	4 Paket	4 Paket
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar**	**413.569.992,00**	**200.346.500,00**	**48,44**	100%	50%
	Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik					
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN	**Tersedianya pemenuhan sarana dan prasarana Paten di Kecamatan**	**413.569.992,00**	**200.346.500,00**	**48,44**	2 Dokumen	1 Dokumen
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	413.569.992,00	200.346.500,00	48,44	2 Dokumen	1 Dokumen
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan**	1.639.001.747,00	480.571.996,00	29,32	85%	42%
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana Kelurahan yang dibangun	1.639.001.747,00	480.571.996,00	29,32	2 Dokumen	2 Dokumen
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana Kelurahan yang dibangun	836.159.187,00	170.800.000,00	20,43	5 Unit	3 Unit
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah kelompok yang diberdayakan	802.842.560,00	309.771.996,00	38,58	2 Pokmas	2 Pokmas
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti**	**41.355.000,00**	**28.152.000,00**	**68,07**	100%	50%
KOORDINASI PENERAPAN DAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH	**Jumlah kegiatan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan**	**41.355.000,00**	**28.152.000,00**	**68,07**	4 Dokumen	2 Dokumen
Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	41.355.000,00	28.152.000,00	68,07	4 Laporan	2 Laporan
KELURAHAN BUNDER						
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan**	**344.732.480,00**	**172.139.565,00**	**48,02**	100%	50%

ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Jumlah Laporan Administrasi umum (Kelurahan Bunder) Jumlah Laporan Administrasi umum (Kelurahan Sukamulya) Jumlah Laporan Administrasi umum	344.732.480,00	172.139.565,00	48,02	4 Dokumen	4 Dokumen
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	344.732.480,00	172.139.565,00	48,02	4 Paket	4 Paket
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar**	**413.569.992,00**	**200.346.500,00**	**44,78**	100%	50%
	Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik					
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN	**Tersedianya pemenuhan sarana dan prasarana Paten di Kecamatan**	**413.569.992,00**	**200.346.500,00**	**44,78**	2 Dokumen	1 Dokumen
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	413.569.992,00	200.346.500,00	44,78	2 Dokumen	1 Dokumen
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan**	1.639.001.747,00	480.571.996,00	41,49	85%	42%
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	**Jumlah sarana dan prasarana Kelurahan yang dibangun**	**1.639.001.747,00**	**480.571.996,00**	**41,49**	**2 Dokumen**	**2 Dokumen**
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana Kelurahan yang dibangun	836.159.187,00	170.800.000,00	43,66	5 Unit	3 Unit
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah kelompok yang diberdayakan	802.842.560,00	309.771.996,00	39,06	2 Pokmas	2 Pokmas
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti**	**41.355.000,00**	**28.152.000,00**	**16,72**	100%	50%
KOORDINASI PENERAPAN DAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH	**Jumlah kegiatan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan**	**41.355.000,00**	**28.152.000,00**	**16,72**	4 Dokumen	2 Dokumen
Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	41.355.000,00	28.152.000,00	16,72	4 Laporan	2 Laporan

Berdasarkan tabel di atas, Realisasi Anggaran Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang sampai dengan Juni 2025 (Triwulan II) adalah Rp12.768.218.478,00 atau sekitar 44,60% dari pagu anggaran Rp28.625.457.349,00.

Dengan realisasi keuangan mencapai 44,60% pada Triwulan II Tahun 2024, capaian fisik dapat di rata-ratakan 50%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang dari sisi keuangan pada pertengahan Tahun 2025 belum optimal. Adapun penyebab belum optimalnya realisasi keuangan sebagai berikut:

1. Belum berakhirnya realisasi pada triwulan II Tahun 2025, dan
2. Beberapa kegiatan seperti PORKAB, Bina Wilayah (BINWIL) dan Fisik yang sebelumnya di anggarkan pada bulan juni belum terrealisasi.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Program Rencana Kerja Perubahan2025

Pada Rancangan Awal Rencana Kerja dan Pendanaan PD Tahun 2025 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian visi, misi, dan tujuan RPD Kabupaten Tangerang 2024-2026. Adapun misi yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan adalah Misi ke-1 (Satu) Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026, yaitu 1. Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik, Demokratis Dan Partisipatif.

Untuk mencapai tujuan tersebut Renstra PD Kecamatan Cikupa menetapkan 1 (Satu) tujuan, yaitu :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik kecamatan.

Dalam rangka mendukung pencapaian Rencana Strategis tersebut ditetapkan 2 (Dua) sasaran strategis antara lain :

1. Terpenuhinya pelayanan publik sesuai dengan standar kecamatan.
2. Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja.

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Cikupa Kabuupaten Tangerang Tahun 2025 ini menjabarkan kebutuhan prioritas program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dan sebagai bahan evaluasi dari capaian program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan di tahun yang lalu, sebagai panduan kinerja bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun berjalan dan perencanaan bagi program dan kegiatan yang akan datang.

Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang pada Tahun 2025 melaksanakan 6 (Enam) Program Utama, 14 Kegiatan, dan 34 Sub Kegiatan yang tercantum dalam program kinerja nomenklaturnya mengacu pada nomenklatur yang terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Daerah, dan dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi , Validasi Dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenlatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, dibawah ini merupakan rekapitulasi program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta anggaran, yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
3. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
4. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
5. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
6. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Berdasarkan uraian di atas, Rancangan Awal Rencana Kerja dan kegiatan Kecamatan Cikupa yang mendukung Prioritas Kabupaten Tahun 2025, adalah sebagaimana pada tabel 5 di bawah ini :

Tabel 3.1 Program Rencana Kerja Perubahan 2025

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			
3	4	8	9	10	11	12	19	20	21
KECAMATAN CIKUPA				**19.908.185.160,00**	**29.364.821.059,00**	**29.987.784.350,00**		**22.662.796.450,00**	
UNSUR KEWILAYAHAN				**19.908.185.160,00**	**29.364.821.059,00**	**29.987.784.350,00**		**22.662.796.450,00**	
KECAMATAN				**19.908.185.160,00**	**29.364.821.059,00**	**29.987.784.350,00**		**22.662.796.450,00**	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan**	**100 Persen**	**100 Persen**	**11.576.904.960,00**	**11.477.173.650,00**	**12.036.957.699,00**		**14.627.135.725,00**	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	10 Dokumen	10 Dokumen	341.597.000,00	389.160.600,00	323.037.400,00		437.500.000,00	KECAMATAN CIKUPA
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	151.320.000,00	150.103.600,00	123.296.400,00		187.500.000,00	KECAMATAN CIKUPA
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	61.882.000,00	86.532.000,00	70.371.000,00		87.500.000,00	KECAMATAN CIKUPA
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan	128.395.000,00	152.525.000,00	129.370.000,00		162.500.000,00	KECAMATAN CIKUPA

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah laporan Administrasi keuangan*	1 dokumen	1 dokumen	7.389.365.160,00	7.431.795.175,00	8.192.828.176,00		9.189.631.450,00	KECAMATAN CIKUPA
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/bulan	30 Orang/bulan	7.281.705.161,00	7.297.808.175,00	8.077.435.176,00		9.102.131.450,00	KECAMATAN CIKUPA
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	1 Laporan	107.659.999,00	133.987.000,00	115.393.000,00		87.500.000,00	KECAMATAN CIKUPA
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Pembinaan Pegawai*	1 dokumen	1 dokumen	302.490.800,00	218.147.300,00	150.358.500,00		375.000.000,00	KECAMATAN CIKUPA
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	30 Paket	30 Paket	166.269.800,00	84.659.000,00	50.369.000,00		250.000.000,00	KECAMATAN CIKUPA
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	40 Orang	40 Orang	136.221.000,00	133.488.300,00	99.989.500,00		125.000.000,00	KECAMATAN CIKUPA
Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Administrasi umum Jumlah Laporan Administrasi umum (Kelurahan Bunder) Jumlah Laporan Administrasi umum (Kelurahan Sukamulya)*	1 dokumen 1 Dokumen 4 Dokumen	1 dokumen 1 Dokumen 4 Dokumen	1.845.611.600,00	1.460.750.674,00	1.357.907.594,00		2.500.004.275,00	KECAMATAN CIKUPA
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	40.000.000,00	32.530.000,00	32.530.000,00		50.000.000,00	KECAMATAN CIKUPA

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	289.908.800,00	348.707.594,00	361.891.714,00		575.000.000,00	KECAMATAN CIKUPA
Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	88.156.000,00	79.463.400,00	79.463.400,00		100.000.000,00	KECAMATAN CIKUPA
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	55.000.000,00	52.083.500,00	28.283.500,00		68.750.000,00	KECAMATAN CIKUPA
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2 Dokumen	14.688.000,00	14.688.000,00	14.688.000,00		18.750.000,00	KECAMATAN CIKUPA
Fasilitasi Kunjungan Tamu									
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	4 Laporan	70.152.000,00	69.204.000,00	46.720.000,00		87.500.000,00	KECAMATAN CIKUPA
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	2 Laporan	87.660.000,00	87.384.000,00	58.152.000,00		100.000.000,00	KECAMATAN CIKUPA
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Jasa Penunjang*	3 dokumen	3 dokumen	1.197.890.400,00	1.226.783.968,00	1.313.883.968,00		1.500.000.000,00	KECAMATAN CIKUPA
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	2 Laporan	243.590.400,00	268.590.400,00	268.590.400,00		306.250.000,00	KECAMATAN CIKUPA
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	18 Laporan	18 Laporan	954.300.000,00	958.193.568,00	1.045.293.568,00		1.193.750.000,00	KECAMATAN CIKUPA

	Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan								
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumalah Laporan pemeliharan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah*	3 dokumen	3 dokumen	499.950.000,00	750.535.933,00	698.942.061,00		625.000.000,00	KECAMATAN CIKUPA
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	5 Unit	200.000.000,00	449.295.520,00	449.295.520,00		250.000.000,00	KECAMATAN CIKUPA
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	6 Unit	69.950.000,00	69.950.000,00	67.250.000,00		87.500.000,00	KECAMATAN CIKUPA
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	230.000.000,00	231.290.413,00	182.396.541,00		287.500.000,00	KECAMATAN CIKUPA
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Persentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standart Persentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standart Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara**	**100 100 95 95 Persen Persen Persen Persen**	**100 100 95 95 Persen Persen Persen Persen**	**3.380.144.600,00**	**12.531.040.502,00**	**12.947.998.704,00**		**2.717.764.950,00**	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Jumlah laporan pelayanan Jumlah laporan pelayanan (Kelurahan Bunder) Jumlah laporan pelayanan (Kelurahan Sukamulya)*	1 Dokumen 2 Dokumen 2 Laporan	1 Dokumen 2 Dokumen 2 Laporan	369.488.600,00	1.020.540.502,00	1.377.698.704,00		459.014.950,00	KECAMATAN CIKUPA
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan									
	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas	2 Laporan	2 Laporan	163.255.800,00	162.275.800,00	476.319.800,00		201.250.000,00	KECAMATAN CIKUPA

	Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan								
Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	*jumlah dokumen pemeliharaan*	1 Dokumen	1 Dokumen	3.010.656.000,00	11.510.500.000,00	11.570.300.000,00		2.258.750.000,00	KECAMATAN CIKUPA
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum									
	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	6 Dokumen	6 Dokumen	3.010.656.000,00	11.510.500.000,00	11.570.300.000,00		2.258.750.000,00	KECAMATAN CIKUPA
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Persentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan**	**85 Persen**	**85 Persen**	**4.233.169.200,00**	**4.644.508.907,00**	**4.403.285.947,00**		**4.362.979.525,00**	
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Jumlah Laporan Pemberdayaan*	6 Dokemen	6 Dokemen	1.247.495.900,00	1.753.412.320,00	1.611.002.000,00		1.531.250.000,00	KECAMATAN CIKUPA
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa									
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	9 Lembaga Kemasyara katan	9 Lembaga Kemasyara katan	100.355.100,00	101.595.000,00	101.595.000,00		125.000.000,00	KECAMATAN CIKUPA
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan									
	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	9 Laporan	9 Laporan	1.147.140.800,00	1.651.817.320,00	1.509.407.000,00		1.406.250.000,00	KECAMATAN CIKUPA
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Jumlah laporan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan*	2 Dokumen	2 Dokumen	320.191.900,00	270.739.600,00	229.318.600,00		125.000.000,00	KECAMATAN CIKUPA
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan									
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2 Lembaga Kemasyara katan	2 Lembaga	320.191.900,00	270.739.600,00	229.318.600,00		125.000.000,00	KECAMATAN CIKUPA

			Kemasyara katan						
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti**	**100 Persen**	**100 Persen**	**204.052.000,00**	**155.212.000,00**	**155.212.000,00**		**454.916.250,00**	
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia									
	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	4 Laporan	4 Laporan	204.052.000,00	155.212.000,00	155.212.000,00		317.565.000,00	KECAMATAN CIKUPA
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti**	**100 Persen**	**100 Persen**	**201.690.000,00**	**200.475.000,00**	**156.716.000,00**		**250.000.000,00**	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Jumlah Rekomendasai yang dikeluarkan*	50 Orang	50 Orang	201.690.000,00	200.475.000,00	156.716.000,00		250.000.000,00	KECAMATAN CIKUPA
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia									
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	50 Orang	50 Orang	99.500.000,00	98.780.000,00	71.421.000,00		125.000.000,00	KECAMATAN CIKUPA
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan									

	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen	102.190.000,00	101.695.000,00	85.295.000,00		125.000.000,00	KECAMATAN CIKUPA
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**Persentase tertib administrasi pemerintahan desa**	**90,25 Persen**	**90,25 Persen**	**201.322.600,00**	**203.725.000,00**	**164.950.000,00**		**250.000.000,00**	
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa*	12 desa/dokumen	12 desa/dokumen	201.322.600,00	203.725.000,00	164.950.000,00		250.000.000,00	KECAMATAN CIKUPA
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa									
	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 Dokumen	12 Dokumen	86.553.700,00	85.797.000,00	65.545.000,00		100.000.000,00	KECAMATAN CIKUPA
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa									
	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	12 Dokumen	12 Dokumen	51.595.300,00	55.292.000,00	42.617.000,00		75.000.000,00	KECAMATAN CIKUPA
Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya									
	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	12 Laporan	12 Laporan	63.173.600,00	62.636.000,00	56.788.000,00		75.000.000,00	KECAMATAN CIKUPA
KELURAHAN SUKAMULYA				**19.908.185.160,00**	**29.364.821.059,00**	**29.987.784.350,00**		**22.662.796.450,00**	
UNSUR KEWILAYAHAN				**19.908.185.160,00**	**29.364.821.059,00**	**29.987.784.350,00**		**22.662.796.450,00**	
KECAMATAN				**19.908.185.160,00**	**29.364.821.059,00**	**29.987.784.350,00**		**22.662.796.450,00**	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan**	**100 Persen**	**100 Persen**	**11.576.904.960,00**	**11.477.173.650,00**	**12.036.957.699,00**		**14.627.135.725,00**	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Administrasi umum Jumlah Laporan Administrasi umum (Kelurahan Bunder) Jumlah Laporan Administrasi umum (Kelurahan Sukamulya)*	1 dokumen 1 Dokumen 4 Dokumen	1 dokumen 1 Dokumen 4 Dokumen	1.845.611.600,00	1.460.750.674,00	1.357.907.594,00		2.500.004.275,00	KECAMATAN CIKUPA

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	563.371.200,00	354.207.480,00	344.732.480,00		704.159.775,00	KECAMATAN CIKUPA
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Persentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standart Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara**	**100 95 Persen Persen**	**100 95 Persen Persen**	**3.380.144.600,00**	**12.531.040.502,00**	**12.947.998.704,00**		**2.717.764.950,00**	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Jumlah laporan pelayanan Jumlah laporan pelayanan (Kelurahan Bunder) Jumlah laporan pelayanan (Kelurahan Sukamulya)*	1 Dokumen 2 Dokumen 2 Laporan	1 Dokumen 2 Dokumen 2 Laporan	369.488.600,00	1.020.540.502,00	1.377.698.704,00		459.014.950,00	KECAMATAN CIKUPA
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan									
	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	2 Laporan	96.325.200,00	420.769.542,00	443.733.744,00		120.380.450,00	KECAMATAN CIKUPA
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Persentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan**	**85 Persen**	**85 Persen**	**4.233.169.200,00**	**4.644.508.907,00**	**4.403.285.947,00**		**4.362.979.525,00**	
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Kelurahan Bunder) Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Kelurahan Sukamulya)*	2 Dokumen	2 Dokumen	2.665.481.400,00	2.620.356.987,00	2.562.965.347,00		2.706.729.525,00	KECAMATAN CIKUPA
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	5 Unit	921.432.000,00	836.159.187,00	836.159.187,00		776.742.275,00	KECAMATAN CIKUPA
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	730.273.600,00	834.034.200,00	803.242.560,00		787.767.500,00	KECAMATAN CIKUPA

	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan								
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti**	**100 Persen**	**100 Persen**	**75.002.400,00**	**47.235.000,00**	**46.755.000,00**		**93.750.000,00**	
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia									
	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	4 Laporan	4 Laporan	75.002.400,00	47.235.000,00	46.755.000,00		93.750.000,00	KECAMATAN CIKUPA
KELURAHAN BUNDER				**19.908.185.160,00**	**29.364.821.059,00**	**29.987.784.350,00**		**22.662.796.450,00**	
UNSUR KEWILAYAHAN				**19.908.185.160,00**	**29.364.821.059,00**	**29.987.784.350,00**		**22.662.796.450,00**	
KECAMATAN				**19.908.185.160,00**	**29.364.821.059,00**	**29.987.784.350,00**		**22.662.796.450,00**	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan**	**100 Persen**	**100 Persen**	**11.576.904.960,00**	**11.477.173.650,00**	**12.036.957.699,00**		**14.627.135.725,00**	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Administrasi umum Jumlah Laporan Administrasi umum (Kelurahan Bunder) Jumlah Laporan Administrasi umum (Kelurahan Sukamulya)*	1 dokumen 1 Dokumen 4 Dokumen	1 dokumen 1 Dokumen 4 Dokumen	1.845.611.600,00	1.460.750.674,00	1.357.907.594,00		2.500.004.275,00	KECAMATAN CIKUPA
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	636.675.600,00	422.482.700,00	391.446.500,00		795.844.500,00	KECAMATAN CIKUPA
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Persentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standart Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara**	**100 95 Persen Persen**	**100 95 Persen Persen**	**3.380.144.600,00**	**12.531.040.502,00**	**12.947.998.704,00**		**2.717.764.950,00**	

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Jumlah laporan pelayanan Jumlah laporan pelayanan (Kelurahan Bunder) Jumlah laporan pelayanan (Kelurahan Sukamulya)*	1 Dokumen 2 Dokumen 2 Laporan	1 Dokumen 2 Dokumen 2 Laporan	369.488.600,00	1.020.540.502,00	1.377.698.704,00		459.014.950,00	KECAMATAN CIKUPA
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan									
	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	2 Laporan	109.907.600,00	437.495.160,00	457.645.160,00		137.384.500,00	KECAMATAN CIKUPA
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Persentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan**	**85 Persen**	**85 Persen**	**4.233.169.200,00**	**4.644.508.907,00**	**4.403.285.947,00**		**4.362.979.525,00**	
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Kelurahan Bunder) Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Kelurahan Sukamulya)*	2 Dokumen	2 Dokumen	2.665.481.400,00	2.620.356.987,00	2.562.965.347,00		2.706.729.525,00	KECAMATAN CIKUPA
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 Unit	7 Unit	482.929.800,00	488.365.400,00	488.365.400,00		603.662.250,00	KECAMATAN CIKUPA
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	530.846.000,00	461.798.200,00	435.198.200,00		538.557.500,00	KECAMATAN CIKUPA
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti**	**100 Persen**	**100 Persen**	**34.881.000,00**	**56.611.000,00**	**51.609.000,00**		**43.601.250,00**	
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia									
	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan	4 Laporan	4 Laporan	34.881.000,00	56.611.000,00	51.609.000,00		43.601.250,00	KECAMATAN CIKUPA

	Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia								
				19.908.185.160,00	**29.364.821.059,00**	**29.987.784.350,00**		**22.662.796.450,00**	

BAB IV
PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang Tahun 2025 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan Rencana Strategis Kecamatan Cikupa Tahun 2024-2026, dan merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan orientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu sampai 1 tahun.

Rencana Kerja Perubahan ini mengandung visi, misi tujuan, sasaran, kebijakan dan program yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Cikupa.

Rencana Kerja Kecamatan Cikupa Tahun 2025 merupakan pedoman dalam melakukan kegiatan kecamatan pada triwulan akhir Tahun 2025. Dengan mengintegrasikan dokumen perencanaan dan penganggaran yang dimiliki oleh Kecamatan, penyusunan Rencana Kegiatan ini diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis khususnya di Kecamatan Cikupa.

Berdasarkan pelaksanaan Program, kegiatan dan Sub kegiatan sampai dengan Triwulan II tahun 2025 ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian pada pelaksanaan Program, Kegiatan dan sub Kegiatan selanjutnya sebagai berikut:

1. Pada proses pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pelayanan Publik perlu ketelitian dan pengawasan lebih intensif agar rencana kerja ini dapat berjalan sesuai yang telah ditetapkan.
2. Pada kegiatan perubahan berupa kegiatan-kegiatan yang belum terrealisasi agar diperhatikan untuk perencanaan dan pelaksanaannya agar dapat menyesuaikan dengan pelaksanaan kegiatan.
3. Kerjasama PPTK, Petugas urusan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pengurus barang, Pengguna anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran dalam melaksanakan kegiatan sesuai tata kelola dan diadakan rapat rutin untuk mengingatkan kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan.

Demikian pula dengan tersusunnya Renja Perubahan Kecamatan Cikupa ini juga masih terdapat kekurang-kekurangan yang harus kami perbaiki. Akhirnya kami ucapkan terima kasih dengan tersusunnya Renja Perubahan Kecamatan Cikupa Tahun 2025 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian visi Pemerintah Kabupaten Tangerang.

34. Kecamatan Panongan

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan 14 Kecamatan di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Serang, Tangerang, Pandeglang, Bogor, Karawang, Subang, Ciamis dan Majelangka dalam wilayah Propimnsi Daerah TK.I Jawa Barat, maka Kecamatan Panongan merupakan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang yang tugas pokok dan fungsinya telah diatur sebagai mana yang tercantum pada Peraturan Bupati Tangerang Nomor 113 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Kecamatan dan keluarahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Perubahan Kecamatan Panongan Tahun 2025 ini disusun mengacu kepada visi, misi, arah kebijakan umum, strategi, prioritas, program dan kegiatan pembangunan Tahun 2025 Kabupaten Tangerang, yang tertuang pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024- 2026 Kabupaten Tangerang.

Selain itu Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 Kecamatan Panongan mengikuti arahan Surat Edaran Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 tentang Efisiensi Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 dan merupakan rencana kerja tahunan sebagai dokumen perencanaan operasional tahunan, dengan memperhatikan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang partisipatif, menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan yang diaktualisasikan dalam pelaksanaan pembangunan satu tahun berjalan, dimana pembangunan itu sendiri merupakan suatu proses yang terus menerus dilakukan dengan terencana untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan dan kehidupan masyarakat.

Rencana kerja Perubahan ini juga merupakan jembatan untuk menuju Renstra 2025-2029 dan mengarah kepada upaya untuk memaksimalkan kapastitas aparatur, sumberdaya manusia, sumber daya alam, teknologi, dan biaya serta pembangunan dalam pelaksanaannya perlu mempertimbangkan keseimbangan antara kebutuhan nyata dengan kemampuan anggaran yang dimiliki daerah, sehingga dalam kondisi seperti ini maka perencanaan pembangunan harus ditata secara bertahap dan berkelanjutan serta dilakukan lebih selektif dengan melihat prioritas-prioritas masalah yang perlu segera ditanggulangi bersifat penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan dalam tahun yang bersangkutan.

1.1.1. Visi

Keberhasilan pembangunan di Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang merupakan bagian integral dari keberhasilan pencapaian visi Kabupaten Tangerang. Oleh karena itu, sangat perlu dilakukan pemaduserasian, penyelarasan, pengintegrasian dan sinergitas perencanaan dan pelaksanaan rencana pembangunan Kecamatan Panongan dengan Rencana Pembangunan Kabupaten Tangerang. Penyelasaran dimaksud antara lain dalam penetapan prioritas

pembangunan, sasaran, rencana program dan kegiatan pembangunan dengan tetap memperhatikan kondisi dan potensi Kecamatan dan Desa.

Mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang Tahun 2024–2026 Visi dan Misi Kecamatan Panongan yang tertuang pada Renstra Tahun 2024 – 2026.

Visi yang ditetapkan mencerminkan gambaran peran dan kondisi yang ingin diwujudkan oleh Kecamatan Panongan di masa depan. Berdasarkan makna tersebut dan sesuai dengan Visi Pemerintah Kabupaten Tangerang Tahun 2024 – 2026, maka visi Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang Tahun 2024 adalah :

"Kabupaten Tangerang Berdaya Saing Menuju Masyarakat Madani"

Diharapkan dengan terumuskannya visi Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang, maka dapat menjadi pedoman bagi seluruh unit kerja internal Kecamatan untuk mewujudkannya. Atas dasar pertimbangan tersebut, selanjutnya misi yang disusun sebagai pedoman bagi pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja internal di Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang.

1.1.2. Misi

Untuk mewujudkan Visi Kabupaten Tangerang tersebut, maka disusun misi dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis internal dan eksternal. Rumusan Misi yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

1) Mewujudkan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Tangerang yang mandiri, berdayasaing tinggi dan berakhlak mulia;
2) Mewujudkan perekonomian daerah yang maju dan berdaya saing berbasis pada potensi keunggulan lokal;
3) Mewujudkan pelayanan dasar bagi masyarakat secara merata dan proporsional;
4) Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, demokratis dan partisipatif; dan
5) Mewujudkan pembangunan yang terpadu dan serasi dengan pendekatan pengembangan wilayah berbasis ekonomi dan ekologi.

1.2. LANDASAN HUKUM

a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 184, Tambahan Lembar Negara republik Indonesia Nomor 2000 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
b. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
c. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tamgbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) kemudian dicabut sebagian dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) dan diubah dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
e. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757) yang mencabut Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Mencabut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011);
i. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang. (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1116;
j. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 33 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan Dan Keluarahan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang;
k. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah;
l. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 16 Tahun 2024 mengenai

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1. Maksud

Maksud Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Perubahan Kecamatan Panongan Tahun 2025 digunakan sebagai dasar dan acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kewilayahan yaitu Kecamatan Panongan dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 1 (satu) tahun sehingga maksud penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Panongan adalah:

1. Mengevaluasi kinerja pembangunan dan penganggaran 2025 serta menganalisa prospek pembangunan dan penganggaran tahun 2025.
2. Mengarahkan visi Kecamatan Panongan kedalam suatu strategi pembangunan yang akan dilaksanakan tahun 2025.
3. Menyusun kebijakan pembangunan Kecamatan Panongan yang dituangkan kedalam susunan program dan indikasi kegiatan tahun 2025.
4. Menyusun anggaran sesuai dengan Surat Edaran Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 tentang Efisiensi Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025

1.3.2. Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Peubahan Kecamatan Panongan Tahun 2025 merupakan penjabaran Rencana Strategi (Renstra) Kecamatan Panongan Tahun 2024 - 2026 kedalam dokumen rencana tahunan, adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah:

1. Mencari dan menyusun kajian dari hasil evaluasi kinerja dan membuat suatu kebijakan yang mengarah untuk peningkatan pada aspek indikator kinerja yang dianggap kurang dan tidak tercapai pada pencapaian kinerja sehingga dijadikan kerangka pembangunan dan penganggaran perubahan Kecamatan Panongan Tahun 2025.
2. Dapat menentukan sasaran dan strategis yang sesuai dengan visi dan misi Kecamatan dalam menentukan Indikasi dan kegiatan pembangunan Kecamatan Panongan tahun 2025.
3. Tersusunnya program dan kegiatan yang selaras dengan tugas pokok dan fungsi berupa kebijakan yang disesuaikan dengan ruang lingkup kewilayahan.
4. Tersusunnya penganggaran yang berpedoman pada aspek efektif dan efisien dalam menentukan program dan kegiatan yang berkenaan dengan bidang dan urusan.
5. Menyesuaikan anggaran efisiensi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Panongan tahun 2025 adalah:

BAB I : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Panongan Tahun 2025
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Panongan
2.3 Isu-Isu Penyelenggara Tugas dan Fungsi SKPD
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
2.6
B A B III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV : PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Panongan Tahun Lalu

Kecamatan Panongan pada tahun anggaran 2024 memiliki pagu anggaran sebesar Rp.26.596.286.979,00 dan telah terserap sebesar Rp.26.155.280.672,00. Kondisi ini menghasilkan sisa anggaran Pemerintah Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang sebesar Rp. 441.006.307,00 atau 1,66 %, dengan penyerapan
anggaran sebsesar 98,34%

PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BERDASAR TRANSAKSI
TAHUN ANGGARAN 2024
PERIODE : 1 JANUARI 2024 S/D 31 DESEMBER 2024

SATKER : 7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN PANONGAN

SUB UNIT : SEMUA SUB UNIT

No	Uraian	Pagu Anggaran	Jumlah Realisasi (Rp.)			Lebih / (Kurang)	
			S/D Periode Lalu	Periode Ini	Total	(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 3	8
5	**BELANJA DAERAH**						
5.1	**BELANJA OPERASI**	18.889.027.424,00	0,00	18.470.073.872,00	18.470.073.872,00	(418.953.552,00)	97,78
5.1.01	Belanja Pegawai	6.486.041.428,00	0,00	6.159.972.905,00	6.159.972.905,00	(326.068.523,00)	94,97
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.402.985.996,00	0,00	12.310.100.967,00	12.310.100.967,00	(92.885.029,00)	99,25
5.2	**BELANJA MODAL**	7.707.259.555,00	0,00	7.685.206.800,00	7.685.206.800,00	(22.052.755,00)	99,71
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	751.917.666,00	0,00	747.110.800,00	747.110.800,00	(4.806.866,00)	99,36
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	722.720.000,00	0,00	720.010.000,00	720.010.000,00	(2.710.000,00)	99,63
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	6.232.621.889,00	0,00	6.218.086.000,00	6.218.086.000,00	(14.535.889,00)	99,77
	JUMLAH BELANJA DAERAH	26.596.286.979,00	0,00	26.155.280.672,00	26.155.280.672,00	(441.006.307,00)	98,34
	SURPLUS / (DEFISIT)	(26.596.286.979,00)	0,00	(26.155.280.672,00)	(26.155.280.672,00)	441.006.307,00	98,34
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(26.596.286.979,00)	0,00	(26.155.280.672,00)	(26.155.280.672,00)	441.006.307,00	98,34

Tigaraksa, 31 Desember 2024

Adanya sisa anggaran tersebut dikarenakan adanya efisiensi dari berbagai kegiatan yang tidak semua terserap, antara lain pada belanja pegawai yang di Tahun 2024 jumlah pegawai berkurang dikarenakan mutasi/perpindahan pegawai, meninggal dunia dan masa jabatan berakhir (pensiun), dan pada belanja modal adanya penawaran harga/kontrak sehingga terjadi efesiensi.

Secara keseluruhan pada tahun anggaran 2025, untuk anggaran murni hasil efisiensi Kecamatan Panongan mendapatkan anggaran sebesar Rp. 25.309.281.917,00 (Dua Puluh Lima Milyar Tiga Ratus Sembilan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Tujuh Belas Rupiah) Dari Total Anggaran tersebut sampai dengan triwulan 1 ini, sudah terealisasi sebesar Rp. 4.789.754.230 (Empat Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Rupiah) atau mencapai 18,92 %. Belum terserapnya keseluruhan Anggaran di Kecamatan Panongan dikarenakan pelaksanaan kegiatan baru sampai dengan triwulan ke 1 dan sedang berjalan ke triwulan II.

Berikut akan disajikan Tabel Review Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Panongan tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra Kecamatan Panongan, yang bertujuan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan PD dalam melaksanakan program dan kegiatannya,

mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra SKPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Review didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya dan perkiraan pelaksanaan DPA Kecamatan Panongan tahun berjalan (tahun 2025). Adapun gambaran selengkapnya tentang evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Panongan tahun 2025 sampai dengan triwulan I disajikan sebagaimana tabel 1 berikut:

Tabel 1
Realisasi Anggaran Tahun 2025 Kecamatan Panongan sampai dengan triwulan I yang belum memenuhi target

Kode	Tujuan/Sasaran Strategis / Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Formulasi			Satuan	Target Tahunan	Target	Realisasi	Capaian	Analisa	
			Anggaran	Realisasi Anggaran s/d	Capaian (%)			TW 1	TW 1	TW 1	...batan/Dukungan	...usi/Catata n
7.01.01.2.02.0001	Penyediaa n Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	7.443.461.419	1.778.021.560	24 %	Orang / Bulan	30	30	27	90%	Untuk Realisasi Gaji Pegawai masih belum maksimal dikarenakan ada 2 posisi kepala seksi & pengurus barang yang masih kosong	Rekon Gaji

Berdasarkan tabel 1 di atas, berikut analisis dari tabel tersebut :

a. Realisasi yang belum memenuhi target kinerja :
   1. Terdapat 1 (satu) realisasi kinerja yang belum tercapai di triwulan I ini yaitu :
      a. Kegiatan Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah, sebesar 90%
   2. Faktor penyebab yang dihadapi sampai dengan triwulan I sejauh ini:
      a. Pada TW I ini masih belum maksimal penyerapan anggarannya dikarenakan ada 2 posisi kepala seksi & pengurus barang yang masih kosong dan masih menunggu informasi dari BKPSDM Kabupaten Tangerang terkait perpindahan pegawai

   3. Upaya Perbaikan yang dapat dilakukan untuk mengatasi hal ini adalah :
      b. Untuk Pegawai yang masih kosong di posisi Kepala seksi Pelayanan dan Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Desa, dilakukan rotasi Plt Kepala Seksi di masing-masing posisi yang kosong sambil menunggu informasi dari BKPSDM serta melakukan rekon gaji dengan BPKAD.

Tabel 2
Realisasi Anggaran Tahun 2025 Kecamatan Panongan sampai dengan triwulan I Yang Memenuhi Target

Kode	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiata n/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Formulasi			Satuan	Target Tahunan	Target	Realisasi	Capaian
			Anggaran	Realisasi Anggaran s/d	Capaian (%)			TW 1	TW 1	TW 1
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan**	**10.959.276.312**	**3.119.790.230**	**28%**	**Persen**	**100**	**25**	**25**	**100%**
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	95.174.100	21.861.900	23%	Dokumen	4	1	1	100%
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	43.300.100	12.871.050	30%	Dokumen	2	-	-	
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	23.424.800	4.506.550	19%	Laporan	1	-	-	
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28.449.200	4.484.300	16%	Laporan	4	1	1	100%
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan	7.478.174.119	1.779.846.560	24%	Dokumen	2	-	-	
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKP	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	34.712.700	1.825.000	5%	Laporan	2	-	-	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pembinaan Pegawai	24.208.800	-	0%	Dokumen	2	-	-	
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	-		Paket	-	-	-	
7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	24.208.800	-	0%	Orang	30	-	-	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	770.646.495	195.358.500	25%	Dokumen	7	2	2	100%
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	-		Paket	-	-	-	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	**328.515.000**	**34.182.000**	10%	**Paket**	**2**	**-**	**-**	
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	**25.000.000**	**-**	0%	**Paket**	**1**	**-**	**-**	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	**207.572.560**	**114.191.000**	55%	**Paket**	**2**	**-**	**-**	

7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	**15.020.935**	**10.222.500**	68%	**Paket**	**1**	**-**	**-**	
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	**122.962.000**	**26.698.000**	22%	**Laporan**	**4**	**1**	**1**	100%
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	**71.576.000**	**10.065.000**	14%	**Laporan**	**4**	**1**	**1**	100%

Kode	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Formulasi			Satuan	Target Tahunan	Target	Realisasi	Capaian
			Anggaran	Realisasi Anggaran s/d	Capaian (%)			TW 1	TW 1	TW 1
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Jasa Penunjang	1.737.778.630	488.333.270	28%	Jenis	3	-	-	
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60.000.000	11.500.000	19%	Laporan	1	-	-	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	216.475.662	47.313.270	22%	Laporan	4	1	1	100%
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1.461.302.968	429.520.000	29%	Laporan	4	1	1	100%
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah\ Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	853.294.168	634.390.000	74%	Dokumen	4	1	1	100%
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	79.254.184	18.600.000	23%	unit	7	7	7	100%
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	121.289.984	7.900.000	7%	unit	1	1	1	100%
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	52.750.000	9.500.000	18%	unit	10	10	10	100%
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	600.000.000	598.390.000	100 %	unit	5	5	5	100%
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		**11.127.570.777**	**778.370.000**	**7%**	**Persen**	**100**	25	25	**100%**
		Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar	**9.250.000**	**2.860.000**	**31%**	**Persen**	**94**	**23,5**	**23,5**	**100%**
		Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara	**11.118.320.777**	**775.510.000**	**7%**	**Persen**	**100**	25	25	**100%**
7.01.02.2.01	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase pemenuhan peenyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	-	-		Persen	-	-	-	
7.01.02.2.01.0002	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-		Dokumen	-	-	-	
7.01.02.2.02	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana Paten di Kecamatan	9.250.000	2.860.000	31%	jenis	4	1	1	100%
7.01.02.2.02.0003	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	9.250.000	2.860.000	31%	Laporan	4	1	1	100%

7.01.02.2.03	Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase infrastruktur yang dipelihara	11.118.320.777	775.510.000	7%	Persen	100	25	25	100%
7.01.02.2.03.0001	Sub kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	11.118.320.777	775.510.000	7%	Dokumen	4	1	1	100%
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan**	**2.386.105.788**	**785.195.400**	**33%**	**Persen**	**28.57**	**5**	**5**	**100%**

Kode	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiata n/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Formulasi			Satuan	Target Tahunan	Target	Realisasi	Capaian
			Anggaran	Realisasi Anggaran s/d	Capaian (%)			TW 1	TW 1	TW 1
7.01.03.2.01	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan/pemberdayaan	1.238.781.800	591.445.400	48%	kelompok	4	1	1	100%
7.01.03.2.01.0001	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	64.803.400	64.803.400	100 %	lembaga	1	1	1	100%
7.01.03.2.01.0003	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1.173.978.400	526.642.000	45%	laporan	4	1	1	100%
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan/pemberdayaan	1.147.323.988	193.750.000	17%	Persen	100	25	25	100%
7.01.03.2.02.0001	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan	9.160.000	9.160.000	100 %	Lembaga Kemasyar akatan	1	1	1	100%
7.01.03.2.02.0002	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	356.307.188	-	0%	Unit	4	-	-	
7.01.03.2.02.0003	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	781.856.800	184.590.000	24%	Pokmas / Ormas	4	1	1	100%
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	-	-		Laporan	-	-	-	
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Meningkatnya kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan Kec. Panongan	-	-		laporan	-	-	-	
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti**	**213.859.900**	**57.461.000**	**27%**	**Persen**	**100**	25	25	**100%**
7.01.04.2.01	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	213.859.900	57.461.000	27%	Persen	100	25	25	100%
7.01.04.2.01.0001	Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	213.859.900	57.461.000	27%	Laporan	4	1	1	100%
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Desa Dengan Laporan Administrasi baik**	**139.084.640**	**7.519.000**	**5%**	**Persen**	**100**	**25**	**25**	**100%**
7.01.06.2.01	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa dengan laporan keuangan baik	139.084.640	7.519.000	5%	Dokumen	7	7	7	100%

7.01.06.2.01.0002	Sub kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	71.990.640	-	0%	Dokumen	4	-	-	
7.01.06.2.01.0017	Sub Kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan	67.094.000	7.519.000	11%	Laporan	4	1	1	100%
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti**	**483.384.500**	**41.418.600**	**9%**	**Persen**	**100**	**25**	**25**	**100%**
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	jumlah rekomendasi yang dikeluarkan	483.384.500	41.418.600	9%	**Persen**	100	**25**	**25**	100%
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-	365.769.500	17.815.000	5%	Orang	100	25	25	100%

Kode	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiata n/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Su b Kegiatan	Formulasi			Satuan	Target Tahuna n	Target	Reali sasi	Capai a n
			Anggaran	Realisasi Anggaran s/d	Capaia n (%)			TW 1	TW 1	TW 1
	Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia								
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	117.615.000	23.603.600	20%	Dokumen	4	1	1	100%

Berdasarkan tabel 2 di atas, berikut analisis dari tabel tersebut

a. Realisasi yang telah memenuhi target kinerja :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota selain kegiatan penyediaan gaji & tunjangan ASN terserap dengan baik dan sesuai anggaran kas.
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik seluruh kegiatan telah terserap dengan baik.
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, seluruh kegiatan telah terserap dengan baik
4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum, seluruh kegiatan terserap dengan baik. Dan sesuai anggaran kas.
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa sudah mencapai target kinerja 7 desa yang dilakukan pengawasan dan pembinaan sampai dengan triwulan II ini sudah melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap 7 desa tersebut.
6. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum telah berjalan dengan baik

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Kecamatan Panongan Tahun sebelumnya dan tahun berjalan 2025, untuk lebih detailnya dapat dilihat pada tabel 3 dibawah ini :

Tabel 3 (T-C.29)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 Kabupaten Tangerang

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Panongan

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
				2022	2023					
					Target Kinerja Renja PD Tahun (n-2) 2023	Realisasi Kinerja Renja PD Tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100,00%**	**100%**	**25%**	**25%**
7.01.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	4	4	4	4	100%	4	1	25%
7.01.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan	2	2	2	2	100%	2	0	0%
7.01.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pembinaan Pegawai	2	2	2	2	100%	2	0	0%
7.01.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	7	7	7	7	100%	7	2	29%

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
				2022	2023				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
					Target Kinerja Renja PD Tahun (n-2) 2023	Realisasi Kinerja Renja PD Tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)			(%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
7.01.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Jasa Penunjang	3	3	3	3	100%	3	1	33%
7.01.01.2.09	Kegiatan :Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4	4	4	4	100%	4	1	25%
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara**	**100,00%**	**95,00%**	**97,00%**	**97,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**25,00%**	**25%**
		Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar	**94,00%**	**90,00%**	**92,00%**	**92,00%**	**100,00%**	**93,00%**	**23,50%**	**25%**
7.01.02.2.02	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Di Kecamatan	Tersedianya pemenuhan sarana dan prasarana Paten di Kecamatan	4	3	3	3	100%	3	1	25%
7.01.02.2.03	Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase infrastruktur yang dipelihara	100%	95%	97%	97%	100%	100%	25%	25%
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan**	**28,57%**	**14,29%**	**14,29%**	**14,29%**	**100,00%**	**28,57%**	**5,00%**	**18%**

7.01.03.2.01	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan/pemberdayaan	4	8	8	8	100%	8	1	25%
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan/pemberday aan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	25%	25%

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
				2022	2023				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
					Target Kinerja Renja PD Tahun (n-2) 2023	Realisasi Kinerja Renja PD Tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)			(%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	0	0	0	0		0	0	
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti**	**100,00%**	**100,00%**	**100%**	**100%**	**100,00%**	**100,00%**	**25,00%**	**25%**
7.01.04.2.01	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	25%	25%
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Presentase Desa Dengan Laporan Administrasi baik**	**100,00%**	**100,00%**	**100%**	**100%**	**100,00%**	**100,00%**	**25,00%**	**25%**
5.1.01.01	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Sub Kegiatan	Persentase desa dengan laporan keuangan dan administrasi baik Kec. Panongan	100	100	100	100	100%	100	100	100%
7.1.6.01	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti**	**100%**	**-**	**-**	**-**		**100%**	**25%**	**25%**
7.1.6.01.2.09	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	jumlah rekomendasi yang dikeluarkan	100	0	0	0		2	25	25%

Berdasarkan tabel 2 (TC.29) di atas, berikut analisis dari tabel tersebut :

a. Realisasi yang belum memenuhi target kinerja pada Tahun 2025 :
    1. Terdapat beberapa realisasi kinerja yang belum tercapai di triwulan I ini yaitu :
        a. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, sebesar 90%
    2. Faktor penyebab yang dihadapi di Tahun 2025 :
        a. Truk Sampah Kecamatan Panongan yang kondisinya masih rusak, dan akan proses perbaikan di TW II Tahun Anggaran 2025
    3. Upaya Perbaikan yang dapat dilakukan untuk mengatasi hal tersebut adalah :
        a. Telah dialokasikan Rehabilitasi Truk Sampah di TA 2025

b. Realisasi yang telah memenuhi target kinerja :
    1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, capaian kinerja tercapai semua kegiatan terserap dengan baik dan berjalan semua.
    2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, capaian kinerja tercapai semua kegiatan terserap dengan baik dan berjalan semua.
    3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, capaian kinerja tercapai semua kegiatan terserap dengan baik dan berjalan semua.
    4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, capaian kinerja tercapai semua kegiatan terserap dengan baik dan berjalan semua.
    5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, capaian kinerja tercapai semua kegiatan terserap dengan baik dan berjalan semua.
    6. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat, capaian kinerja tercapai semua kegiatan terserap dengan baik dan berjalan semua.
    7. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, capaian kinerja tercapai semua kegiatan terserap dengan baik dan berjalan semua.
    8. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan, capaian kinerja tercapai semua kegiatan terserap dengan baik dan berjalan semua.
    9. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, capaian kinerja tercapai semua kegiatan terserap dengan baik dan berjalan semua.
    10. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Sub Kegiatan, capaian kinerja tercapai semua kegiatan terserap dengan baik dan berjalan semua.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Panongan

Perangkat Daerah Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang, merupakan Lembaga Teknis Daerah sebagai unsur penunjang

Pemerintah Daerah dalam perencanaan pembangunan. Pencanangan pembangunan yang berkualitas dan professional dapat menjadi wahana untuk memperbaiki pola pembangunan di tingkat daerah, sehingga daerah dapat berkiprah dengan leluasa untuk membangun daerahnya sesuai potensi dan kemampuan yang ada (potensi lokal).

Perangkat Daerah Kecamatan Panongan yang berfungsi sebagai Perangkat Daerah Koordinatif dan Pelayanan masyarakat mempunyai tujuan utamanya adalah untuk kepuasan pelayanan masyarakat secara umum, capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Panongan dapat dicapai bila Indeks Kepuasan Masyarakat tercapai sesuai dengan target. Untuk mendapatkan kepuasan Masyarakat dengan Indeks Kepuasan Masyarakat yang tinggi perlu adanya Standar Pelayanan Minimal (SPM) karena SPM merupakan tolok ukur bagi aparatur dalam memberikan pelayanan kepada Masyarakat, Kepuasan Masyarakat yang menjadi indicator standar pelayanan tetap dikontrol dengan dilakukan review Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) setiap triwulan untuk dicarikan Solusi dari permasalahan yang ada

Berikut adalah hasil survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Triwulan I Kecamatan Panongan TA 2025

	Nilai Unsur Pelayanan								
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
IKM per unsur	3.38	3.39	3.28	3.87	3.33	3.45	3.5	3.41	3.81
IKM Unit Layanan	86.75 (BAIK)								





Adapun beberapa hal yang perlu dilakukan untuk keberhasilan dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, antara lain :

1. Memberikan pelatihan bagi pegawai di depan meja pelayanan agar sesuai dengan SOP pelayanan.
2. Meningkatkan sistem pelayanan di kecamatan panongan dengan cara berkoordinasi dengan Dinas terkait.
3. Meningkatkan kualitas ruang pelayanan untuk meningkatkan kenyamanan dan kebersihan ruang pelayanan.
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam memberikan survey kepuasan masyarakat
5. Meningkatkan inovasi pelayanan yang berorentasi kepada masyarakat untuk memudahkan sistem pelayanan terpadu.

Pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Panongan dapat dilihat sebagaimana Tabel 4 berikut:

Tabel 4 (T-C.30)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat	83.03	83.60	84.70	84.90	83.03	83.60	85	85,5	Telah sesuai target dan melebihi capaian target Renstra PD

2	Nilai AKIP Kecamatan Panongan	Nilai AKIP	Hasil Nilai AKIP	73,92	74	75,5	75,8	74	69,15	71,5	72,5	Di Tahun 2023 mengalami penurunan nilai dikarenakan adanya kebijakan baru penilaian dari tim Inspektorat
3	Presentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Presentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Hasil Presentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	66	66	-	-	66	66	-	-	Telah sesuai target namun di Tahun 2024 sudah tidak menjadi standar indikator kinerja utama kecamatan

2.3 Isu-Isu Penyelenggaraaan Tugas dan Fungsi SKPD

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu penyelenggaraan tugas dan fungsi yang ada di Kecamatan Panongan antara lain sebagai berikut:

1. Masih banyaknya tingkat stunting dan keluarga berisiko stunting di wilayah kecamatan Panongan.
2. Kemiskinan Ekstrim yang menjadi prioritas kabupaten tangerang untuk segera dituntaskan
3. Masih adanya beberapa wilayah rawan banjir di wilayah kecamatan Panongan.
4. Perlunya peningkatan dan pengembangan UMKM di wilayah Panongan guna memberdayakan produk dalam negeri.
5. Masih kurangnya sarana dan prasarana transportasi pelayanan publik yang terintegrasi guna mendukung pelaksanaan pelayanan publik yang berkualitas.
6. Masih banyaknya pelanggaran Perda tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum.
7. Masih banyaknya infrastruktur dasar baik jalan, jembatan, saluran drainase, sarana pendidikan dan sarana kesehatan yang kurang baik dan mendesak untuk dibangun.
8. Masih minimnya kepedulian masyarakat tentang kebersihan dan persampahan.
9. Masih kurangnya koordinasi antar SKPD secara maksimal
10. Masih kurangnya tempat penyimpanan arsip yang sesuai.

Untuk menjawab isu isu di kecamatan Panongan maka dibentuklah beberapa kebijakan perencanaan kegiatan di kecamatan Panongan adalah sebagai berikut :

1. Operasional Forum Komunikasi Kecamatan Sehat (FKKS) berupa perlengkapan administrasi, rapat-rapat dan pembinaan, pendampingan lapangan.

2. Gerakan Bersama Atasi Kemiskinan Ekstream dan Stunting (Gebrak Tegas) Pencegahan dan penurunan Stunting dan penghapusan kemiskinan ekstream berupa Pemberian Makanan Tambahan (PMT) balita Stunting, rembuk stunting.
3. Penyelenggaraan pemberdayaan keluarga prasejahtera.
4. Verifikasi dan validasi data pengangguran.
5. Kecamatan tanggap bencana dan penanganan pasca bencana.
6. Pengembangan Produk Unggulan Kecamatan, pojok UMKM di Kecamatan dan Pembinaan UMKM.
7. Pengembangan Inovasi Kecamatan.
8. Pengembangan Kampung Tematik.
9. Pengelolaan Sampah berupa Pembentukan Bank Sampah, Bio Konversi dan Sirkular Ekonomi.
10. Penyediaan RTH (Ruang Terbuka Hijau).
11. Rehabilitasi RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) dan Rehabilitas yang terdampak bencana.
12. Pemeliharaan Stadion Mini.
13. Pengangkutan sampah dari tempat pembuangan sampah sementara sampai tiba di tempat pembuangan sampah di akhir untuk wilayah sekitar jalan desa/kelurahan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Panongan Tahun 2025 merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam arah kebijakan RPJPD Kabupaten Tangerang tahun 2024-2026 yang dijabarkan dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026. Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Kecamatan Panongan Tahun 2025 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 serta mengikuti arahan Surat Edaran Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 tentang Efisiensi Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025

Dalam konteks perencanaan pembangunan, Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan, melayani/memenuhi kebutuhan masyarakat serta turut serta dalam Pembangunan yang selaras dengan visi-misi pemerintah pusat, Di sisi lain, dalam era globalisasi, Kecamatan Panongan dituntut untuk siap dan sanggup membuat/menyusun suatu perencanaan yang baik, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat serta menekan angka stunting dan kemiskinan ekstrim. Untuk lebih jelasnya mengenai review rancangan RKPD Perubahan Tahun 2025 dapat dilihat Tabel 5 (T-C.31) berikut ini:

Tabel 5. (T-C.31)
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
Perubahan Tahun 2025 Kecamatan Panongan
Kabupaten Tangerang

RANCANGAN RKPD PERUBAHAN 2025						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
UNSUR KEWILAYAHAN						**UNSUR KEWILAYAHAN**						
KECAMATAN PANONGAN SEMUA SUB UNIT					***25.226.340.947***	***KECAMATAN PANONGAN SEMUA SUB UNIT***					***31.352.408.644***	
KECAMATAN					**23.096.143.999**	**KECAMATAN**					**29.222.211.696**	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		**Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan**	**Persen**	**100%**	**9.707.477.382**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan**	**Persen**	**100%**	**9.830.798.079**	
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Dokumen**	**4**	**95.174.100**	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Dokumen**	**4**	**95.174.100**	
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Tangerang, Panongan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	43.300.100	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Tangerang, Panongan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	43.300.100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

RANCANGAN RKPD PERUBAHAN 2025						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	**Lokasi Kegiatan**	**Indikator Kinerja**	**Satuan**	**Target Capaian Kinerja**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**Program/Kegiatan/**	**Lokasi Kegiatan**	**Indikator Kinerja**	**Satuan**	**Target Capaian Kinerja**	**Pagu Indikatif (Rp)**	
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Tangerang, Panongan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	23.424.800	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Tangerang, Panongan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	23.424.800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Tangerang, Panongan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	Laporan	4	28.449.200	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Tangerang, Panongan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	Laporan	4	28.449.200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**Jumlah laporan keuangan**	**Dokumen**	**2**	**7.004.033.149**	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Jumlah laporan keuangan**	**Dokumen**	**2**	**7.110.100.746**	
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Tangerang, Panongan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	30	6.969.320.449	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Tangerang, Panongan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	30	7.075.388.046	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Tangerang, Panongan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	2	34.712.700	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Tangerang, Panongan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	2	34.712.700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		**Jumlah Laporan Pembinaan Pegawai**	**Dokumen**	**2**	**24.208.800**	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Jumlah Laporan Pembinaan Pegawai**	**Dokumen**	**2**	**24.208.800**	

RANCANGAN RKPD PERUBAHAN 2025						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	**Lokasi Kegiatan**	**Indikator Kinerja**	**Satuan**	**Target Capaian Kinerja**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**Program/Kegiatan/**	**Lokasi Kegiatan**	**Indikator Kinerja**	**Satuan**	**Target Capaian Kinerja**	**Pagu Indikatif (Rp)**	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Tangerang, Panongan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	30	24.208.800	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Tangerang, Panongan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	30	24.208.800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		**Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Dokumen**	**7**	**468.649.935**	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Dokumen**	**7**	**485.903.035**	
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Tangerang, Panongan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	2	202.533.000	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Tangerang, Panongan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	2	219.786.100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Tangerang, Panongan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	25.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Tangerang, Panongan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	25.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Tangerang, Panongan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	76.764.000	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Tangerang, Panongan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	76.764.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Tangerang, Panongan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	15.020.935	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Tangerang, Panongan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	15.020.935	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

RANCANGAN RKPD PERUBAHAN 2025						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	**Lokasi Kegiatan**	**Indikator Kinerja**	**Satuan**	**Target Capaian Kinerja**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**Program/Kegiatan/**	**Lokasi Kegiatan**	**Indikator Kinerja**	**Satuan**	**Target Capaian Kinerja**	**Pagu Indikatif (Rp)**	
Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Tangerang, Panongan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4	94.306.000	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Tangerang, Panongan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4	94.306.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Tangerang, Panongan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	55.026.000	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Tangerang, Panongan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	55.026.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Jumlah Laporan Jasa Penunjang**	**Jenis**	**3**	**1.262.117.230**	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Jumlah Laporan Jasa Penunjang**	**Jenis**	**3**	**1.262.117.230**	
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Tangerang, Panongan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	60.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Tangerang, Panongan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	60.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Tangerang, Panongan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4	165.505.662	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Tangerang, Panongan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4	165.505.662	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Tangerang, Panongan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	1.036.611.568	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Tangerang, Panongan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	1.036.611.568	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

RANCANGAN RKPD PERUBAHAN 2025						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	**Lokasi Kegiatan**	**Indikator Kinerja**	**Satuan**	**Target Capaian Kinerja**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**Program/Kegiatan/**	**Lokasi Kegiatan**	**Indikator Kinerja**	**Satuan**	**Target Capaian Kinerja**	**Pagu Indikatif (Rp)**	
Kegiatan :Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Dokumen**	**4**	**853.294.168**	**Kegiatan :Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Dokumen**	**4**	**853.294.168**	
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Tangerang, Panongan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	7	79.254.184	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Tangerang, Panongan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	7	79.254.184	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Tangerang, Panongan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	1	121.289.984	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Tangerang, Panongan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	2	121.289.984	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Tangerang, Panongan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	10	52.750.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Tangerang, Panongan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	10	52.750.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Tangerang, Panongan, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	5	600.000.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Tangerang, Panongan, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	5	600.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		**Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara**	**Persen**	**100%**	**11.419.170.777**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		**Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara**	**Persen**	**100%**	**17.387.982.777**	
		Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar	**Persen**	**94%**				**Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar**	**Persen**	**94%**		

RANCANGAN RKPD PERUBAHAN 2025						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	**Lokasi Kegiatan**	**Indikator Kinerja**	**Satuan**	**Target Capaian Kinerja**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**Program/Kegiatan/**	**Lokasi Kegiatan**	**Indikator Kinerja**	**Satuan**	**Target Capaian Kinerja**	**Pagu Indikatif (Rp)**	
Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		**Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana Paten di Kecamatan**	**Jenis**	**4**	**9.250.000**	**Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**		**Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana Paten di Kecamatan**	**Jenis**	**4**	**9.250.000**	
Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Tangerang, Panongan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	4	9.250.000	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Tangerang, Panongan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	4	9.250.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum		**Persentase infrastruktur yang dipelihara**	**Persen**	**100**	**11.409.920.777**	**Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**		**Persentase infrastruktur yang dipelihara**	**Persen**	**100**	**17.378.732.777**	
Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kab. Tangerang, Panongan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Dokumen	4	11.409.920.777	Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kab. Tangerang, Panongan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Dokumen	4	17.378.732.777	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		**Persentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan**	**Persen**	**28,57 %**	**1.238.781.800**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		**Persentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan**	**Persen**	**28,57 %**	**1.238.781.800**	

RANCANGAN RKPD PERUBAHAN 2025						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	**Lokasi Kegiatan**	**Indikator Kinerja**	**Satuan**	**Target Capaian Kinerja**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**Program/Kegiatan/**	**Lokasi Kegiatan**	**Indikator Kinerja**	**Satuan**	**Target Capaian Kinerja**	**Pagu Indikatif (Rp)**	
Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		**Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan/pemberdayaan**	**Kelompok**	**4**	**1.238.781.800**	**Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**		**Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan/pemberdayaan**	**Kelompok**	**4**	**1.238.781.800**	
Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan	Kab. Tangerang, Panongan, Semua Kel/Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga	1	64.803.400	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di	Kab. Tangerang, Panongan, Semua Kel/Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga	1	64.803.400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Tangerang, Panongan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	4	1.173.978.400	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Tangerang, Panongan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	4	1.173.978.400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		**Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti**	**Persen**	**100%**	**108.244.900**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		**Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti**	**Persen**	**100%**	**108.244.900**	
Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		**Jumlah kegiatan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan**	**Persen**	**100**	**108.244.900**	**Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**		**Jumlah kegiatan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan**	**Persen**	**100**	**108.244.900**	
Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia danInstansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kab. Tangerang, Panongan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	4	108.244.900	Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia danInstansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kab. Tangerang, Panongan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	4	108.244.900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

RANCANGAN RKPD PERUBAHAN 2025						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	**Lokasi Kegiatan**	**Indikator Kinerja**	**Satuan**	**Target Capaian Kinerja**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**Program/Kegiatan/**	**Lokasi Kegiatan**	**Indikator Kinerja**	**Satuan**	**Target Capaian Kinerja**	**Pagu Indikatif (Rp)**	
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		**Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti**	**Persen**	**10000 %**	**483.384.500**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		**Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti**	**Persen**	**10000 %**	**517.319.500**	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan UmumSesuai Penugasan Kepala Daerah		**jumlah rekomendasi yang dikeluarkan**	**Persen**	**100**	**483.384.500**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan UmumSesuai Penugasan Kepala Daerah**		**jumlah rekomendasi yang dikeluarkan**	**Persen**	**100**	**517.319.500**	
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kab. Tangerang, Panongan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang	100	365.769.500	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kab. Tangerang, Panongan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang	100	399.704.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kab. Tangerang, Panongan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	4	117.615.000	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kab. Tangerang, Panongan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	4	117.615.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		**Persentase Desa Dengan Laporan Administrasi baik**	**Persen**	**10000 %**	**139.084.640**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**		**Persentase Desa Dengan Laporan Administrasi baik**	**Persen**	**10000 %**	**139.084.640**	

RANCANGAN RKPD PERUBAHAN 2025						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	**Lokasi Kegiatan**	**Indikator Kinerja**	**Satuan**	**Target Capaian Kinerja**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**Program/Kegiatan/**	**Lokasi Kegiatan**	**Indikator Kinerja**	**Satuan**	**Target Capaian Kinerja**	**Pagu Indikatif (Rp)**	
Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Sub Kegiatan		**Persentase desa dengan laporan keuangan dan administrasi baik Kec. Panongan**	**Persen**	**100**	**139.084.640**	**Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Sub Kegiatan**		**Persentase desa dengan laporan keuangan dan administrasi baik Kec. Panongan**	**Persen**	**100**	**139.084.640**	
Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kab. Tangerang, Panongan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	4	71.990.640	Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kab. Tangerang, Panongan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	4	71.990.640	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Sub Kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kab. Tangerang, Panongan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan	Laporan	4	67.094.000	Sub Kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kab. Tangerang, Panongan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan	Laporan	4	67.094.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
KELURAHAN MEKARBAKTI					**2.130.196.948**	**KELURAHAN MEKARBAKTI**					**2.130.196.948**	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		**Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan**	**Persen**	**100%**	**877.257.960**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan**	**Persen**	**100%**	**877.257.960**	
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		**Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Dokumen**	**7**	**301.996.560**	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Dokumen**	**7**	**301.996.560**	
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Tangerang, Panongan, Mekarbakti	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	2	125.982.000	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Tangerang, Panongan, Mekarbakti	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	2	125.982.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

RANCANGAN RKPD PERUBAHAN 2025						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	**Lokasi Kegiatan**	**Indikator Kinerja**	**Satuan**	**Target Capaian Kinerja**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**Program/Kegiatan/**	**Lokasi Kegiatan**	**Indikator Kinerja**	**Satuan**	**Target Capaian Kinerja**	**Pagu Indikatif (Rp)**	
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Tangerang, Panongan, Mekarbakti	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Paket	2	130.808.560	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Tangerang, Panongan, Mekarbakti	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Paket	2	130.808.560	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Tangerang, Panongan, Mekarbakti	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4	28.656.000	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Tangerang, Panongan, Mekarbakti	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4	28.656.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Tangerang, Panongan, Mekarbakti	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	16.550.000	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Tangerang, Panongan, Mekarbakti	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	16.550.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Jumlah Laporan Jasa Penunjang**	**Jenis**	**3**	**575.261.400**	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Jumlah Laporan Jasa Penunjang**	**Jenis**	**3**	**575.261.400**	
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Tangerang, Panongan, Mekarbakti	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4	50.970.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Tangerang, Panongan, Mekarbakti	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4	50.970.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Tangerang, Panongan, Mekarbakti	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	524.291.400	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Tangerang, Panongan, Mekarbakti	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	524.291.400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		**Persentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan**	**Persen**	**100%**	**1.147.323.988**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		**Persentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan**	**Persen**	**100%**	**1.147.323.988**	

RANCANGAN RKPD PERUBAHAN 2025						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	**Lokasi Kegiatan**	**Indikator Kinerja**	**Satuan**	**Target Capaian Kinerja**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**Program/Kegiatan/**	**Lokasi Kegiatan**	**Indikator Kinerja**	**Satuan**	**Target Capaian Kinerja**	**Pagu Indikatif (Rp)**	
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		**Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan/pemberdayaan**	**Persen**	**100**	**1.147.323.988**	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**		**Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan/pemberdayaan**	**Persen**	**100**	**1.147.323.988**	
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kab. Tangerang, Panongan, Mekarbakti	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga Kemasyarakatan	1	9.160.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kab. Tangerang, Panongan, Mekarbakti	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga Kemasyarakatan	1	9.160.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kab. Tangerang, Panongan, Mekarbakti	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	4	356.307.188	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kab. Tangerang, Panongan, Mekarbakti	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	4	356.307.188	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kab. Tangerang, Panongan, Mekarbakti	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	4	781.856.800	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kab. Tangerang, Panongan, Mekarbakti	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	4	781.856.800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		**Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti**	**Persen**	**100%**	**105.615.000**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		**Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti**	**Persen**	**100%**	**105.615.000**	
Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		**Jumlah kegiatan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan**	**Persen**	**100**	**105.615.000**	**Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**		**Jumlah kegiatan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan**	**Persen**	**100**	**105.615.000**	

RANCANGAN RKPD PERUBAHAN 2025						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						Sumber Dana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	**Lokasi Kegiatan**	**Indikator Kinerja**	**Satuan**	**Target Capaian Kinerja**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**Program/Kegiatan/**	**Lokasi Kegiatan**	**Indikator Kinerja**	**Satuan**	**Target Capaian Kinerja**	**Pagu Indikatif (Rp)**	
Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kab. Tangerang, Panongan, Mekarbakti	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	4	105.615.000	Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kab. Tangerang, Panongan, Mekarbakti	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	4	105.615.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

2.5.1 Bahwa Usulan Program / Kegiatan yang dibahas didalam musrenbang mekanismenya diawali dari penggalian gagasan dari tingkat Desa/Kelurahan atau lingkungan melibatkan unsur Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Unsur Perempuan dan Organisasi Kemasyarakatan sehingga menghasilkan usulan program yang di bawa ke form Musrenbangdes. Pada form Musrenbangdes menghasilkan skala prioritas usulan tingkat Desa/ Kelurahan selanjutnya ditunjuk perwakilan dari Desa / Kelurahan untuk mengawal usulan tersebut di Form Musrenbang Tingkat Kecamatan.

2.5.2 Hasil Musrenbang Kecamatan merupakan Skala prioritas program yang telah sesuai dengan kebutuhan real masyarakat serta isu - isu penting yang akan menjadi prioritas dari masing-masing Perangkat Daerah yang ada pada Unit Pelaksana Teknis di tingkat Kecamatan. Perangkat Daerah Kecamatan Panongan sebagai fasilitator untuk menampung usulan dari Desa/Kelurahan yang diumumkan ke Perangkat Daerah terkait.

2.5.3 Beberapa usulan dari masyarakat pada tahun 2024 yang belum masuk dalam APBD 2025, akan dianalisa kembali pada Renja Perubahan Tahun 2025 ini sesuai dengan ketersediaan pagu yg ada dan akan disesuaikan dengan skala prioritas.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada Rancangan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian visi, misi, dan tujuan RPJPD Kabupaten Tangerang 2024- 2026 dan paralel sesuai dengan RPJMD 2025-2029 dengan sesuai dengan instruksi presiden terkait efisiensi anggaran.

Untuk mencapai tujuan tersebut Renstra PD Kecamatan Panongan 2024-2026 menetapkan 1 (satu) tujuan, yaitu :

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan publik kecamatan Panongan

Dalam rangka mendukung pencapaian Rencana Strategis tersebut ditetapkan 2 (dua) sasaran strategis antara lain :

1. Terpenuhinya pelayanan publik sesuai dengan standar kecamatan
2. Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja

Program dan kegiatan yang ada di Perangkat Daerah Kantor Kecamatan Panongan pada dasarnya masih tetap mengacu dan pada tahun yang lalu dan penambahan disesuaikan dengan tuntuntan perkembangan jaman dan kebutuhan.

Pada tahun anggaran 2025 Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang merencanakan akan melaksanakan sebanyak 6 (Enam) program, 13 (Tiga Belas) kegiatan yang di dukung oleh 28 (Dua Puluh Delapan) Sub Kegiatan, terlampir pada Tabel 6 di bawah ini:

Tabel 3.1
Perubahan Rencana Kerja Pendanaan Kecamatan Panongan
Tahun Anggaran 2025

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan			Perubahan Rencana Tahun 2025							Selisih APBD Murni VS APD Recofusing	Selisih RKPD VS Pagu Indikatif Perubahan 2025	Penanggung Jawab	Keterangan Selisih
						Satuan	Target Capaian Kinerja	APBD 2025	APBD 2025 - Recofusing	RKPD 2025	Pagu Indikatif Perubahan	Sumber Dana				
	7	Unsur Kewilayahan														
	7	**Kecamatan Panongan Semua Sub Unit**						**25.870.141.642**	**25.309.281.917**	**25.226.340.947**	**31.352.408.644**		**-560.859.725**	**6.126.067.697**	kecamatan panongan	
	7.01	Kecamatan						23.643.277.494	23.192.284.969	23.096.143.999	29.222.211.696		(450.992.525)	6.126.067.697		
1	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Capaian Program**	**:**	**Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan**	**Persen**	**100%**	**10.240.659.017**	**10.095.218.352**	**9.707.477.382**	**9.830.798.079**		**-145.440.665**	**123.320.697**		
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Keluaran	:	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	Dokumen	4	125.622.100	95.174.100	95.174.100	95.174.100		-30.448.000	0		
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Keluaran	:	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	56.440.100	43.300.100	43.300.100	43.300.100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-13.140.000	0	Kasubag Perencanaan dan Keuangan Kec. Panongan	
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		:	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	30.804.800	23.424.800	23.424.800	23.424.800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-7.380.000	0	Kasubag Perencanaan dan Keuangan Kec. Panongan	

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan			Perubahan Rencana Tahun 2025							Selisih APBD Murni VS APD Recofusing	Selisih RKPD VS Pagu Indikatif Perubahan 2025	Penanggung Jawab	Keterangan Selisih
						Satuan	Target Capaian Kinerja	APBD 2025	APBD 2025 - Recofusing	RKPD 2025	Pagu Indikatif Perubahan	Sumber Dana				
	7	Unsur Kewilayahan														
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		:	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	38.377.200	28.449.200	28.449.200	28.449.200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-9.928.000	0	Kasubag Perencanaan dan Keuangan Kec. Panongan	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		:	Jumlah laporan keuangan	Dokumen	2	7.489.124.119	7.478.174.119	7.004.033.149	7.110.100.746		-10.950.000	106.067.597		
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		:	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	30	7.443.461.419	7.443.461.419	6.969.320.449	7.075.388.046	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	106.067.597	Kasubag Perencanaan dan Keuangan Kec. Panongan	Pengurangan dan Penambahan gaji hasil rekon dengan bidang anggaran
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKP		:	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	2	45.662.700	34.712.700	34.712.700	34.712.700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-10.950.000	0	Kasubag Perencanaan dan Keuangan Kec. Panongan	
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		:	Jumlah Laporan Pembinaan Pegawai	Dokumen	2	33.042.400	24.208.800	24.208.800	24.208.800		(8.833.600)	-		
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	30	33.042.400	24.208.800	24.208.800	24.208.800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-8.833.600	0	Kasubag Umpeg Kec. Panongan	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		:	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen	7	563.859.000	468.649.935	468.649.935	485.903.035		-95.209.065	17.253.100		

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan			Perubahan Rencana Tahun 2025							Selisih APBD Murni VS APD Recofusing	Selisih RKPD VS Pagu Indikatif Perubahan 2025	Penanggung Jawab	Keterangan Selisih
						Satuan	Target Capaian Kinerja	APBD 2025	APBD 2025 - Recofusing	RKPD 2025	Pagu Indikatif Perubahan	Sumber Dana				
	7	Unsur Kewilayahan														
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		:	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	2	202.533.000	202.533.000	202.533.000	219.786.100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	17.253.100	Kasubag Umpeg Kec. Panongan	Penambahan Untuk Pembelian Laptop Bendahara dikrenakan masih menggunakan laptop pribadi
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		:	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	0	Kasubag Umpeg Kec. Panongan	
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		:	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	76.764.000	76.764.000	76.764.000	76.764.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	0	Kasubag Umpeg Kec. Panongan	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		:	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	20.000.000	15.020.935	15.020.935	15.020.935	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-4.979.065	0	Kasubag Umpeg Kec. Panongan	
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu		:	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4	129.200.000	94.306.000	94.306.000	94.306.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-34.894.000	0	Kasubag Umpeg Kec. Panongan	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		:	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	110.362.000	55.026.000	55.026.000	55.026.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-55.336.000	0	Kasubag Umpeg Kec. Panongan	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		:	Jumlah Laporan Jasa Penunjang	Jenis	3	1.175.717.230	1.175.717.230	1.262.117.230	1.262.117.230		0	0		

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan			Perubahan Rencana Tahun 2025							Selisih APBD Murni VS APD Recofusing	Selisih RKPD VS Pagu Indikatif Perubahan 2025	Penanggung Jawab	Keterangan Selisih
						Satuan	Target Capai an Kinerja	APBD 2025	APBD 2025 - Recofusing	RKPD 2025	Pagu Indikatif Perubahan	Sumber Dana				
	7	Unsur Kewilayahan														
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	0	Kasubag Umpeg Kec. Panongan	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		:	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4	165.505.662	165.505.662	165.505.662	165.505.662	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	0	Kasubag Umpeg Kec. Panongan	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		:	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	950.211.568	950.211.568	1.036.611.568	1.036.611.568	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	0	Kasubag Umpeg Kec. Panongan	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Keluaran	:	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	4	853.294.168	853.294.168	853.294.168	853.294.168		0	0		
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Keluaran	:	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	7	79.254.184	79.254.184	79.254.184	79.254.184	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	0	Kasubag Umpeg Kec. Panongan	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Keluaran	:	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	1	121.289.984	121.289.984	121.289.984	121.289.984	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	0	Kasubag Umpeg Kec. Panongan	
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Keluaran	:	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	10	52.750.000	52.750.000	52.750.000	52.750.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	0	Kasubag Umpeg Kec. Panongan	
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Keluaran	:	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	5	600.000.000	600.000.000	600.000.000	600.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	0	Kasubag Umpeg Kec. Panongan	

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan			Perubahan Rencana Tahun 2025							Selisih APBD Murni VS APD Recofusing	Selisih RKPD VS Pagu Indikatif Perubahan 2025	Penanggung Jawab	Keterangan Selisih
						Satuan	Target Capaian Kinerja	APBD 2025	APBD 2025 - Recofusing	RKPD 2025	Pagu Indikatif Perubahan	Sumber Dana				
	7	Unsur Kewilayahan														
	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				**Persen**	**100**	**11.150.599.777**	**11.127.570.777**	**11.419.170.777**	**17.387.982.777**		**(23.029.000)**	**5.968.812.000**		
			Capaian Program	:	**Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar**	**Persen**	94	13.840.000	9.250.000	9.250.000	9.250.000		(4.590.000)	-		
					Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara	**Persen**	100	11.136.759.777	11.118.320.777	11.409.920.777	17.378.732.777		(18.439.000)	5.968.812.000		
	7.01.02.2.02	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Keluaran	:	Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana Paten di Kecamatan	jenis	4	13.840.000,00	9.250.000,00	9.250.000,00	9.250.000,00		(4.590.000,00)	-		
	7.01.02.2.02.0003	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Keluaran	:	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	4	13.840.000,00	9.250.000	9.250.000	9.250.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-4.590.000	0	Kasi Pelayanan Kec. Panongan	
	7.01.02.2.03	Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Keluaran	:	Persentase infrastruktur yang dipelihara	Persen	100%	11.136.759.777	11.118.320.777	11.409.920.777	17.378.732.777		(18.439.000)	5.968.812.000		

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan			Perubahan Rencana Tahun 2025							Selisih APBD Murni VS APD Recofusing	Selisih RKPD VS Pagu Indikatif Perubahan 2025	Penanggung Jawab	Keterangan Selisih
						Satuan	Target Capai an Kinerja	APBD 2025	APBD 2025 - Recofusing	RKPD 2025	Pagu Indikatif Perubahan	Sumber Dana				
	7	Unsur Kewilayahan														
	7.01.02.2.03.0001	Sub kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Keluaran	:	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Dokumen	4	11.136.759.777	11.118.320.777	11.409.920.777	17.378.732.777	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-18.439.000	5.968.812.000	Kasi Pelayanan Kec. Panongan	Penambahn Titik untuk kegiatan infrastructure di Kecamatan (belum termasuk data Pokir)
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Capaian Program**	:	**Persentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan**	**Persen**	28,571	1.345.629.800	1.238.781.800	1.238.781.800	1.238.781.800		(106.848.000)	-		
	7.01.03.2.01	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Keluaran	:	Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan/pemberdayaan	kelompok	4	1.345.629.800,00	1.238.781.800,00	1.238.781.800,00	1.238.781.800,00		(106.848.000,00)	-		
	7.01.03.2.01.0001	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Keluaran	:	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	lembaga	1	64.803.400	64.803.400	64.803.400	64.803.400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	0	Kasi Pemberdayaan Kec. Panongan	
	7.01.03.2.01.0003	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Keluaran	:	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	laporan	4	1.280.826.400	1.173.978.400	1.173.978.400	1.173.978.400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-106.848.000	0	Kasi Pemberdayaan Kec. Panongan	
	7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Capaian Program**	:	**Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti**	**Persen**	100	144.349.200	108.244.900	108.244.900	108.244.900		(36.104.300)	-		

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan			Perubahan Rencana Tahun 2025							Selisih APBD Murni VS APD Recofusing	Selisih RKPD VS Pagu Indikatif Perubahan 2025	Penanggung Jawab	Keterangan Selisih
						Satuan	Target Capaian Kinerja	APBD 2025	APBD 2025 - Recofusing	RKPD 2025	Pagu Indikatif Perubahan	Sumber Dana				
	7	Unsur Kewilayahan														
	7.01.04.2.01	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Keluaran	:	Jumlah kegiatan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	Persen	100	144.349.200	108.244.900	108.244.900	108.244.900		(36.104.300)	-		
	7.01.04.2.01.0001	Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Keluaran		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	4	144.349.200	108.244.900	108.244.900	108.244.900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-36.104.300	0	Kasi Trantibum dan Linmas Kec. Panongan	
	7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**			**Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti**	**Persen**	**100**	**577.171.900**	**483.384.500**	**483.384.500**	**517.319.500**		**(93.787.400)**	**33.935.000**		
	7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**			**jumlah rekomendasi yang dikeluarkan**	**Persen**	**100**	**577.171.900**	**483.384.500**	**483.384.500**	**517.319.500**		**(93.787.400)**	**33.935.000**		

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan			Perubahan Rencana Tahun 2025							Selisih APBD Murni VS APD Recofusing	Selisih RKPD VS Pagu Indikatif Perubahan 2025	Penanggung Jawab	Keterangan Selisih
						Satuan	Target Capaian Kinerja	APBD 2025	APBD 2025 - Recofusing	RKPD 2025	Pagu Indikatif Perubahan	Sumber Dana				
	7	Unsur Kewilayahan														
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang	100	427.938.100	365.769.500	365.769.500	399.704.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-62.168.600	33.935.000	Kasi Pemerintahan Umum Kec. Panongan	Penambahan Karena ada anggaran Porkab Tangerang
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	4	149.233.800	117.615.000	117.615.000	117.615.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-31.618.800	0	Kasi Pemerintahan Umum Kec. Panongan	
	7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Capaian Program**		**Persentase Desa Dengan Laporan Administrasi baik**	**Persen**	**100**	**184.867.800**	**139.084.640**	**139.084.640**	**139.084.640**		**(45.783.160)**	-		
	7.01.06.2.01	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Keluaran		Persentase desa dengan laporan keuangan dan administrasi baik Kec. Panongan	**Persen**	100	184.867.800	139.084.640	139.084.640	139.084.640		(45.783.160)	-		

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan			Perubahan Rencana Tahun 2025							Selisih APBD Murni VS APD Recofusing	Selisih RKPD VS Pagu Indikatif Perubahan 2025	Penanggung Jawab	Keterangan Selisih
						Satuan	Target Capaian Kinerja	APBD 2025	APBD 2025 - Recofusing	RKPD 2025	Pagu Indikatif Perubahan	Sumber Dana				
	7	Unsur Kewilayahan														
	7.01.06.2.01.0002	Sub kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Keluaran		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	4	97.729.800	71.990.640	71.990.640	71.990.640	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-25.739.160	0	Kasi Binwas Pemdes Kec.Panongan	
	7.01.06.2.01.0017	Sub Kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Keluaran		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan	Laporan	4	87.138.000	67.094.000	67.094.000	67.094.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-20.044.000	0	Kasi Binwas Pemdes Kec.Panongan	
2		Kelurahan Mekarbakti						2.226.864.148	2.116.996.948	2.130.196.948	2.130.196.948		(109.867.200)	-		
	7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Capaian Program**	**:**	**Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan**	**Persen**	**100%**	**911.853.560**	**864.057.960**	**877.257.960**	**877.257.960**		**-47.795.600**	**0**		
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen	7	327.600.560	301.996.560	301.996.560	301.996.560		-25.604.000	0		
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	2	125.982.000	125.982.000	125.982.000	125.982.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	0	Kasi Pemerintahan Kel. Mekarbakti	
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Paket	2	134.678.560	130.808.560	130.808.560	130.808.560	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-3.870.000	0	Kasi Pemerintahan Kel. Mekarbakti	
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4	33.840.000	28.656.000	28.656.000	28.656.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-5.184.000	0	Kasi Pemerintahan Kel. Mekarbakti	

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan			Perubahan Rencana Tahun 2025							Selisih APBD Murni VS APD Recofusing	Selisih RKPD VS Pagu Indikatif Perubahan 2025	Penanggung Jawab	Keterangan Selisih
						Satuan	Target Capaian Kinerja	APBD 2025	APBD 2025 - Recofusing	RKPD 2025	Pagu Indikatif Perubahan	Sumber Dana				
	7	Unsur Kewilayahan														
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	33.100.000	16.550.000	16.550.000	16.550.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-16.550.000	0	Kasi Pemerintahan Kel. Mekarbakti	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Jumlah Laporan Jasa Penunjang	Jenis	3	584.253.000	562.061.400	575.261.400	575.261.400		-22.191.600	-		
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4	50.970.000	50.970.000	50.970.000	50.970.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	0	Kasi Pemerintahan Kel. Mekarbakti	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	533.283.000	511.091.400	524.291.400	524.291.400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-22.191.600	0	Kasi Pemerintahan Kel. Mekarbakti	
	7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Capaian Program**	**:**	**Persentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan**	**Persen**	**100%**	**1.174.160.588**	**1.147.323.988**	**1.147.323.988**	**1.147.323.988**		**-26.836.600**	**0**		
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Keluaran	:	Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan/pemberdayaan	Persen	100	1.174.160.588	1.147.323.988	1.147.323.988	1.147.323.988		(26.836.600)	-		
	7.01.03.2.02.0001	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Keluaran	:	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga Kemasyarakatan	1	9.160.000	9.160.000	9.160.000	9.160.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	0	Kasi Pemberdayaan Kel. Mekarbakti	
	7.01.03.2.02.0002	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Keluaran	:	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang	Unit	4	356.307.188	356.307.188	356.307.188	356.307.188	PENDAPATAN ASLI DAERAH	0	0	Kasi Pemberdayaan Kel.	

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan			Perubahan Rencana Tahun 2025							Selisih APBD Murni VS APD Recofusing	Selisih RKPD VS Pagu Indikatif Perubahan 2025	Penanggung Jawab	Keterangan Selisih
						Satuan	Target Capaian Kinerja	APBD 2025	APBD 2025 - Recofusing	RKPD 2025	Pagu Indikatif Perubahan	Sumber Dana				
	7	Unsur Kewilayahan														
					Terbangun							(PAD)			Mekarbakti	
	7.01.03.2.02.0003	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan	:	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	4	808.693.400	781.856.800	781.856.800	781.856.800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-26.836.600	0	Kasi Pemberdayaan Kel. Mekarbakti	
	7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Capaian Program**	**:**	**Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti**	**Persen**	**100%**	**140.850.000**	**105.615.000**	**105.615.000**	**105.615.000**		**-35.235.000**	**0**		
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kelurahan	:	Jumlah kegiatan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	Persen	100	140.850.000	105.615.000	105.615.000	105.615.000		(35.235.000)	-		
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kelurahan	:	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	4	140.850.000	105.615.000	105.615.000	105.615.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-35.235.000	0	Kasi Trantibum Linmas Kel. Mekarbakti	

BAB IV
PENUTUP

Renja Perubahan Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang Tahun 2025 ini dibuat sesuai dengan SE Efisiensi dari Pemerintah Pusat dan memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada saat perubahan di 2025 ini, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

4.1 Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Renja Perubahan Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang Tahun 2025 antara lain :

1. Perumusan program dan kegiatan beserta indikatornya pada Renja Perubahan Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tangerang;
2. Penyusunan Renja Perubahan Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang 2025 merupakan pedoman dalam melakukan kegiatan kecamatan pada tahun 2025. Selain itu terdapat penambahan output/ keluaran kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Kecamatan Panongan;
3. Penyusunan Renja Perubahan Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang ini juga berpedoman pada RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2025, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.
4. Penyusunan Renja Perubahan Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang ini juga mengacu pada Surat Edaran Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 tentang Efisiensi Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025

4.2 Kaidah Pelaksanaan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Kaidah pelaksanaan dokumen Renja Perubahan Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

4.2.1 Penyusunan Renja Perubahan Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang berpedoman pada RPD tahun pertama yaitu 2024 dan RKPD Perubahan Kabupaten Tangerang Tahun 2025

4.2.2 Penyusunan Renja Perubahan Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang Tahun 2025 adalah upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan yang bersumber dari dana APBD Perubahan Kabupaten Tangerang dengan berpedoman pada dokumen perencanaan.

4.3 Rencana Tindak Lanjut

Rencana Tindak Lanjut dari penyusunan dokumen Renja Perubahan Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang Tahun 2025 ini adalah melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan serta melaksanakan pengendalian setiap triwulan baik untuk realisasi anggaran maupun atas kinerja yang telah ditetapkan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan stakeholder pembangunan di Kabupaten Tangerang.

Demikian dengan tersusunnya Renja Perubahan Kecamatan Panongan ini semoga dapat menjadi pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan di Tahun 2025 Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang agar dapat terwujud konsistensi antara perencanaan penganggaran serta pelaksanaan program dan kegiatan di Kecamatan Panongan, dan tersusunnya Renja Perubahan Kecamatan Panongan Tahun 2025 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian visi Pemerintah Kabupaten Tangerang.

35. Kecamatan Curug

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan kepada setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) PD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun, dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan dalam Renstra PD ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Renja PD, dalam hal ini Renja Kecamatan Curug, mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, mengingat Renja Kecamatan Curug merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari Visi, Misi dan Program Kecamatan Curug, sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Renja merupakan dasar atau acuan memasukkan program kegiatan ke dalam KUA dan PPAS, dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan Tahun 2025. Selain itu, Renja merupakan alat untuk evaluasi pelaksanaan program kegiatan instansi, untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Mengingat arti strategis dokumen Renja PD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka dalam proses penyusunan hingga penetapan dokumen Renja PD mengikuti tata cara dan alur penyusunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

Seiring hal tersebut di atas, dalam penyusunan rancangan Renja Perubahan PD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan perubahan RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja Perubahan SKPD dapat dikerjakan secara paralel dengan penyusunan rancangan perubahan RKPD, dengan melihat kondisi terkini dari PD, evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembar Negara Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
13. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4578)

15. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/200/II/BANGDA/2008; perihal pedoman penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 11).
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
19. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 20 tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2025

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Kantor Kecamatan Curug adalah menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program, dan kegiatan yang menjadi tolak ukur dan alat bantu bagi unit-unit kerja yang ada pada lingkungan Kecamatan Curug untuk secara konsekuen dan konsisten menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Tujuan dari Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah (Renja PD) Kantor Kecamatan Curug adalah guna mengevaluasi atas rencana kerja murni tahun 2025 dan merumuskan kembali serta penyesuaian program dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kantor Kecamatan Curug Tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan secara ringkas tentang latar belakang renja PD, proses penyusunan, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan

BAB II HASIL *EVALUASI RENJA TAHUN LALU*

Menguraikan hasil evaluasi anggaran dan capaian kinerja renja tahun 2025

BAB III TUJUAN DAN *SASARAN PERANGKAT DAERAH*

Menguraikan tujuan dan sasaran renja kecamatan curug tahun 2025 dan program kegiatan yang berjalan dan perubahan di tahun 2025.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Menguraikan rencana kerja dan pendanaan perubahan Kecamatan Curug Tahun Anggaran 2025.

BAB V PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Curug Sampai Dengan Triwulan II

Evaluasi pelaksanaan merupakan salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah. Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II mengacu pada APBD tahun berjalan selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan.

Hasil evaluasi Renja Kecamatan Curug tahun 2025 sampai dengan Triwulan II Tahun 2025, adalah sebagaimana tabel 1 berikut :

Tabel 1.
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten Renja Perangkat Daerah Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang Periode Pelaksanaan: sampai dengan TW II Tahun 2025

Kode	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II								
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7		8		9		12 = 8+9+10+11		13 = 6+12		14 = 13/5x100 %		15
7.01.01	Meningkatnya PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Capaian Program	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	100 Persen	17.708.295.147	100 Persen	14.849.075.434	100 Persen	16.580.828.961	25%	4.117.391.835	25%	3.658.530.819	50%	7.775.922.654	150%	22.624.998.088	150 %	128%	
7.01.01.2.01	Meningkatnya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Keluaran	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Dokumen	214.162.724	6 Dokumen	175.414.500	7 Dokumen	140.028.000	1 Dokumen	26.646.000	1 Dokumen	18.441.000	2 Dokumen	45.087.000	8 Dokumen	220.501.500	133 %	103%	
			Hasil	Persentase Ketersediaan Dokumen perencanaan dan Pelaporan	100%		100%		100%												

Kode	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II								
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7		8		9		12 = 8+9+10+11		13 = 6+12		14 = 13/5x100 %		15
7.01.01.2.01.01	Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Keluaran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	97.971.399	4 Dokumen	99.358.900	4 Dokumen	70.522.000	1 Dokumen	15.886.000	1 Dokumen	4.910.000	2 Dokumen	20.796.000	6 Dokumen	120.154.900	150 %	123%	Kec. Curug
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kel Sukabakti	2 Dokumen	6.361.515	0 Dokumen	-	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	0%	0%	Kel. Sukabakti
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kel Binong	2 Dokumen	7.505.509	0 Dokumen	-	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	0%	0%	Kel. Binong

Kode	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II								
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7		8		9		12 = 8+9+10+11		13 = 6+12		14 = 13/5x100 %		15
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kel Curug Kulon	2 Dokumen	6.440.709	0 Dokumen	-	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	0%	0%	Kel. Curug Kulon
7.01.01.2.01.06	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Keluaran	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	43.364.845	2 Laporan	36.658.400	2 Laporan	31.122.000	1 Laporan	2.000.000	1 Laporan	5.807.000	2 Laporan	7.807.000	4 Laporan	44.465.400	200 %	103%	Kec. Curug

Kode	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II								
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7		8		9		12 = 8+9+10+11		13 = 6+12		14 = 13/5x100 %		15
7.01.01.2.01.07	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Keluaran	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	52.518.747	1 Laporan	39.397.200	1 Laporan	38.384.000	0,5 Laporan	8.760.000	0,5 Laporan	7.724.000	1 Laporan	16.484.000	2 Laporan	55.881.200	200 %	106%	Kec. Curug
7.01.01.2.02	**Meningkatnya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Keluaran**	**Jumlah laporan keuangan**	**1 Dokumen**	**11.572.796.753**	**1 Dokumen**	**9.140.176.729**	**1 Dokumen**	**10.366.631.213**	**1 Dokumen**	**2.696.483.745**	**1 Dokumen**	**2.678.027.355**	**1 Dokumen**	**5.374.511.100**	**2 Dokumen**	**14.514.687.829**	**200 %**	**125%**	
			Hasil	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100%**		**100%**		**100%**												
7.01.01.2.02.01	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Keluaran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	41 Orang/ Bulan	11.532.458.002	41 Orang/ Bulan	9.110.739.929	41 Orang/ Bulan	10.337.876.213	41 Orang/ Bulan	2.673.330.745	41 Orang/ Bulan	2.678.027.355	41 Orang/ Bulan	5.351.358.100	82 Orang/ Bulan	14.462.098.029	200 %	125%	Kec. Curug

Kode	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II								
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7		8		9		12 = 8+9+10+11		13 = 6+12		14 = 13/5x100 %		15
7.01.01.2.02.07	Tersedianya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Keluaran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	40.338.750	2 Laporan	29.436.800	2 Laporan	28.755.000	1 Laporan	23.153.000	1 Laporan	-	2 Laporan	23.153.000	4 Laporan	52.589.800	200%	130%	Kec. Curug
7.01.01.2.05	**Meningkatnya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Keluaran**	**Jumlah pegawai yang difasilitas**	**43 Orang**	**165.426.568**	**43 Orang**	**156.224.900**	**41 Orang**	**169.562.000**	**0 Orang**	**-**	**41 Orang**	**29.610.000**	**43 Orang**	**29.610.000**	**86 Orang**	**185.834.900**	**200%**	**112%**	
			Hasil	**Prosentase aparatur yang meningkat kapasitasnya**	**100%**		**100%**		**100%**												
7.01.01.2.05.02	Tersedianya Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Keluaran	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	43 Paket	56.526.568	43 Paket	52.696.300	43 Paket	84.878.000	0 Paket	-	33 Paket	29.610.000	33 Paket	29.610.000	76 Paket	82.306.300	177%	146%	Kec. Curug

Kode	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II								
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7		8		9		12 = 8+9+10+11		13 = 6+12		14 = 13/5x100 %		15
X.XX.01.2.05.11	TerlaksananyaBimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Keluaran	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	43 Orang	108.900.000	50 Orang	103.528.600	100 Orang	84.684.000	0 Orang	-	0 Orang	-	0 Orang	-	50 Orang	103.528.600	116 %	95 %	Kec. Curug
7.01.01.2.06	**Meningkatnya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Keluaran**	**Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**9 Jenis**	**1.976.187.524**	**8 Jenis**	**2.176.942.300**	**8 Jenis**	**1.834.093.600**	**2 Jenis**	**282.404.200**	**2 Jenis**	**266.430.500**	**4 Jenis**	**548.834.700**	**12 Jenis**	**2.725.777.000**	**133 %**	**138%**	
			Hasil	**Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**		**100%**		**100%**												
7.01.01.2.06.01	Tersedianya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Keluaran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	26.094.033	4 Paket	40.521.500	4 Paket	23.425.500	1 Paket	20.460.000	1 Paket	428.000	2 Paket	20.888.000	6 Paket	61.409.500	150 %	235%	Kec. Curug

Kode	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II								
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7		8		9		12 = 8+9+10+11		13 = 6+12		14 = 13/5x100 %		15
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Kel Sukabakti	4 Paket	13.650.008	4 Paket	12.838.200	4 Paket	12.638.400	3 Paket	4.102.000	0 Paket	-	3 Paket	4.102.000	7 Paket	16.940.200	175 %	124%	Kel. Sukabakti
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Kel Binong	4 Paket	12.690.221	4 Paket	9.234.900	4 Paket	5.523.000	0 Paket	-	4 Paket	5.523.000	4 Paket	5.523.000	8 Paket	14.757.900	200 %	116%	Kel. Binong
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Kel Curug Kulon	5 Paket	7.584.896	5 Paket	4.975.500	5 Paket	4.356.600	5 Paket	4.354.000	0 Paket	-	5 Paket	4.354.000	10 Paket	9.329.500	200 %	123%	Kel. Curug Kulon
7.01.01.2.06.02	Tersedianya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Keluaran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	396.012.617	8 Paket	522.547.600	12 Paket	786.468.800	0 Paket	-	6 Paket	6.446.000	6 Paket	6.446.000	14 Paket	528.993.600	140 %	134%	Kec. Curug
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Kel Sukabakti	20 Paket	80.748.918	14 Paket	174.372.200	14 Paket	149.797.500	0 Paket	-	14 Paket	-	14 Paket	-	28 Paket	174.372.200	140 %	216%	Kel. Sukabakti

Kode	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II								
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7		8		9		12 = 8+9+10+11		13 = 6+12		14 = 13/5x100 %		15
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Kel Binong	16 Paket	183.070.272	10 Paket	189.350.700	12 Paket	92.417.700	0 Paket	-	6 Paket	82.629.000	6 Paket	82.629.000	16 Paket	271.979.700	100 %	149%	Kel. Binong
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Kel Curug Kulon	15 Paket	242.649.461	6 Paket	219.871.600	6 Paket	21.792.000	0 Paket	-	5 Paket	14.462.000	5 Paket	14.462.000	11 Paket	234.333.600	73 %	97 %	Kel. Curug Kulon
7.01.01.2.06.03	Tersedianya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Keluaran	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	16 Paket	38.328.526	10 Paket	123.094.400	12 Paket	50.833.000	6 Paket	50.577.000	0 Paket	-	6 Paket	50.577.000	16 Paket	173.671.400	100 %	453%	Kec. Curug
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Kel Sukabakti	13 Paket	30.403.445	7 Paket	22.250.300	10 Paket	16.857.100	10 Paket	16.779.500	0 Paket	-	10 Paket	16.779.500	17 Paket	39.029.800	131 %	128%	Kel. Sukabakti
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Kel Binong	13 Paket	77.829.657	7 Paket	18.865.400	10 Paket	6.612.500	0 Paket	-	10 Paket	6.507.000	10 Paket	6.507.000	17 Paket	25.372.400	131 %	33 %	Kel. Binong
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Kel Curug Kulon	13 Paket	30.810.233	7 Paket	25.001.900	10 Paket	11.043.000	10 Paket	10.964.500	0 Paket	-	10 Paket	10.964.500	17 Paket	35.966.400	131 %	117%	Kel. Curug Kulon
7.01.01.2.06.04	Tersedianya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Keluaran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	51 Paket	130.118.306	48 Paket	99.193.300	48 Paket	105.222.100	10 Paket	35.760.000	5 Paket	68.450.000	15 Paket	104.210.000	63 Paket	203.403.300	124 %	156%	Kec. Curug
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yangDisediakan Kel Sukabakti	31 Paket	38.826.089	25 Paket	36.459.200	25 Paket	43.325.550	23 Paket	41.983.200	0 Paket	-	23 Paket	41.983.200	48 Paket	78.442.400	155 %	202%	Kel. Sukabakti

Kode	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II								
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7		8		9		12 = 8+9+10+11		13 = 6+12		14 = 13/5x100 %		15
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Kel Binong	31 Paket	74.672.241	28 Paket	56.977.100	30 Paket	42.063.500	15 Paket	28.666.500	0 Paket	-	15 Paket	28.666.500	43 Paket	85.643.600	139 %	115%	Kel. Binong
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Kel Curug Kulon	14 Paket	35.024.611	8 Paket	27.238.700	12 Paket	27.214.950	6 Paket	4.595.000	5 Paket	17.476.500	11 Paket	22.071.500	19 Paket	49.310.200	136 %	141%	Kel. Curug Kulon
7.01.01.2.06.05	Tersedianya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Keluaran	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	38.788.147	4 Paket	110.835.000	4 Paket	101.560.000	1 Paket	2.000.000	1 Paket	25.860.000	2 Paket	27.860.000	6 Paket	138.695.000	120 %	358%	Kec. Curug
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Kel Sukabakti	11 Paket	18.795.296	5 Paket	20.077.800	5 Paket	20.172.400	2 Paket	15.871.500	0 Paket	-	2 Paket	15.871.500	7 Paket	35.949.300	64 %	191%	Kel. Sukabakti
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Kel Binong	11 Paket	40.480.995	5 Paket	31.053.000	5 Paket	10.750.000	0 Paket	-	0 Paket	-	0 Paket	-	5 Paket	31.053.000	45 %	77 %	Kel. Binong
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Kel Curug Kulon	12 Paket	32.596.794	7 Paket	24.810.000	10 Paket	11.972.000	0 Paket	-	0 Paket	-	0 Paket	-	7 Paket	24.810.000	58 %	76 %	Kel. Curug Kulon

Kode	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II								
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7		8		9		12 = 8+9+10+11		13 = 6+12		14 = 13/5x100 %		15
7.01.01.2.06.08	Terlaksannya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Keluaran	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	13 Laporan	96.875.000	12 Laporan	138.040.000	12 Laporan	97.960.000	3 Laporan	21.806.000	3 Laporan	18.474.000	6 Laporan	40.280.000	18 Laporan	178.320.000	138 %	184%	Kec. Curug
				Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Kel Sukabakti	14 Laporan	19.837.440	8 Laporan	20.240.000	12 Laporan	17.215.000	3 Laporan	1.565.000	3 Laporan	4.695.000	6 Laporan	6.260.000	14 Laporan	26.500.000	100 %	134%	Kel. Sukabakti
				Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Kel Binong	375 Laporan	47.044.800	365 Laporan	26.400.000	12 Laporan	29.610.000	3 Laporan	6.180.000	3 Laporan	6.180.000	6 Laporan	12.360.000	371 Laporan	38.760.000	99 %	82 %	Kel. Binong
				Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Kel Curug Kulon	21 Laporan	51.321.600	15 Laporan	33.474.000	12 Laporan	33.474.000	3 Laporan	9.450.000	3 Laporan	-	6 Laporan	9.450.000	21 Laporan	42.924.000	100 %	84 %	Kel. Curug Kulon
7.01.01.2.06.09	Tersedianya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Keluaran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	126.977.400	3 Laporan	129.840.000	4 Laporan	80.373.000	1 Laporan	6.390.000	1 Laporan	6.000.000	2 Laporan	12.390.000	5 Laporan	142.230.000	167 %	112%	Kec. Curug

Kode	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II								
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7		8		9		12 = 8+9+10+11		13 = 6+12		14 = 13/5x100 %		15
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kel Sukabakti	3 Laporan	29.148.900	3 Laporan	13.650.000	3 Laporan	9.900.000	0 Laporan	-	0 Laporan	-	0 Laporan	-	3 Laporan	13.650.000	100 %	47 %	Kel. Sukabakti
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kel Binong	3 Laporan	25.275.690	3 Laporan	18.780.000	3 Laporan	9.900.000	1 Laporan	900.000	1 Laporan	1.050.000	2 Laporan	1.950.000	5 Laporan	20.730.000	167 %	82 %	Kel. Binong
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kel Curug Kulon	3 Laporan	30.531.930	3 Laporan	26.950.000	3 Laporan	11.616.000	1 Laporan	-	2 Laporan	2.250.000	3 Laporan	2.250.000	6 Laporan	29.200.000	200 %	96 %	Kel. Curug Kulon
7.01.01.2.08	**Meningkatnya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Keluaran**	**Tersedianya Jasa Penunjang**	**4 Jenis**	**2.458.743.300**	**4 Jenis**	**2.275.006.700**	**4 Jenis**	**2.556.557.069**	**1 Jenis**	**592.133.290**	**1 Jenis**	**455.514.464**	**2 Jenis**	**1.047.647.754**	**6 Jenis**	**3.322.654.454**	**150 %**	**135%**	
			Hasil	**Persentase pemenuhan Jasa Penunjang**	**100%**		**100%**		**100%**												

Kode	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II								
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7		8		9		12 = 8+9+10+11		13 = 6+12		14 = 13/5x100 %		15
7.01.01.2.08.01	Tersedianya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	17 Laporan	22.813.125	12 Laporan	16.251.600	12 Laporan	11.771.400	3 Laporan	3.767.000	3 Laporan	7.047.400	6 Laporan	10.814.400	18 Laporan	27.066.000	106 %	119%	Kec. Curug
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Sukabakti	3 Laporan	27.137.885	1 Laporan	17.540.000	12 Laporan	2.236.000	0 Laporan	-	12 Laporan	2.236.000	12 Laporan	2.236.000	13 Laporan	19.776.000	433 %	73 %	Kel. Sukabakti
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Binong	7 Laporan	23.059.507	3 Laporan	18.194.700	12 Laporan	2.795.000	0 Laporan	-	0 Laporan	-	0 Laporan	-	3 Laporan	18.194.700	43 %	79 %	Kel. Binong
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Curug Kulon	17 Laporan	23.059.507	14 Laporan	17.540.000	12 Laporan	8.648.000	12 Laporan	8.605.000	0 Laporan	-	12 Laporan	8.605.000	26 Laporan	26.145.000	153 %	113%	Kel. Curug Kulon
7.01.01.2.08.02	Tersedianya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	6 Laporan	142.629.960	5 Laporan	124.560.000	5 Laporan	136.738.301	2 Laporan	22.660.428	3 Laporan	15.812.952	5 Laporan	38.473.380	10 Laporan	163.033.380	167 %	114%	Kec. Curug

Kode	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II								
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7		8		9		12 = 8+9+10+11		13 = 6+12		14 = 13/5x100 %		15
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Kel Sukabakti	6 Laporan	78.978.346	4 Laporan	89.978.400	12 Laporan	96.094.800	3 Laporan	14.026.944	3 Laporan	8.347.054	6 Laporan	22.373.998	10 Laporan	112.352.398	167 %	142%	Kel. Sukabakti
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Kel Binong	6 Laporan	67.753.224	4 Laporan	89.352.000	12 Laporan	83.952.000	3 Laporan	9.635.400	3 Laporan	9.099.600	6 Laporan	18.735.000	10 Laporan	108.087.000	167 %	160%	Kel. Binong
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Kel Curug Kulon	6 Laporan	47.676.420	4 Laporan	39.380.000	12 Laporan	39.380.000	3 Laporan	5.001.018	3 Laporan	3.859.358	6 Laporan	8.860.376	10 Laporan	48.240.376	167 %	101%	Kel. Curug Kulon
7.01.01.2.08.04	Tersedianya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Laporan	504.072.891	4 Laporan	837.272.000	12 Laporan	1.024.165.568	3 Laporan	232.205.000	3 Laporan	175.085.600	6 Laporan	407.290.600	10 Laporan	1.244.562.600	167 %	247%	Kec. Curug

Kode	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II								
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7		8		9		12 = 8+9+10+11		13 = 6+12		14 = 13/5x100 %		15
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Kel Sukabakti	1 Laporan	547.387.247	1 Laporan	360.078.000	12 Laporan	407.916.000	3 Laporan	121.152.000	3 Laporan	56.702.500	6 Laporan	177.854.500	7 Laporan	537.932.500	700 %	98 %	Kel. Sukabakti
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Kel Binong	1 Laporan	487.087.595	1 Laporan	320.430.000	12 Laporan	359.430.000	3 Laporan	79.830.500	3 Laporan	85.374.000	6 Laporan	165.204.500	7 Laporan	485.634.500	700 %	10 0%	Kel. Binong
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Kel Curug Kulon	5 Laporan	487.087.595	5 Laporan	344.430.000	12 Laporan	383.430.000	3 Laporan	95.250.000	3 Laporan	91.950.000	6 Laporan	187.200.000	11 Laporan	531.630.000	220 %	10 9%	Kel. Curug Kulon
7.01.01.2.09	**Meningkatnya Kegiatan :Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kegiatan :Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Keluaran**	**Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**5 Jenis**	**1.320.978.279**	**5 Jenis**	**925.310.305**	**4 Jenis**	**1.513.957.079**	**1 Jenis**	**519.724.600**	**2 Jenis**	**210.507.500**	**3 Jenis**	**730.232.100**	**8 Jenis**	**1.655.542.405**	**160 %**	**12 5%**	
			Hasil	**Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	**100%**		**100%**		**100%**												

Kode	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II								
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7		8		9		12 = 8+9+10+11		13 = 6+12		14 = 13/5x100 %		15
7.01.01.2.09.01	Tersedianya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Keluaran	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	49.452.240	4 Unit	38.994.196	1 Unit	54.181.192	0,5 Unit	11.214.000	0,5 Unit	6.380.000	1 Unit	17.594.000	5 Unit	56.588.196	83 %	114%	Kec. Curug
7.01.01.2.09.02	Tersedianya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Keluaran	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	52.161.890	3 Unit	236.218.984	3 Unit	312.229.548	1 Unit	27.036.000	2 Unit	34.905.000	3 Unit	61.941.000	6 Unit	298.159.984	120 %	572%	Kec. Curug
7.01.01.2.09.06	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Keluaran	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	35.670.800	8 Unit	26.100.000	28 Unit	32.700.000	5 Unit	6.100.000	10 Unit	-	15 Unit	6.100.000	23 Unit	32.200.000	230 %	90 %	Kec. Curug
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Kel Sukabakti	3 Unit	41.261.000	3 Unit	27.000.000	16 Unit	28.200.000	4 Unit	3.000.000	4 Unit	7.200.000	8 Unit	10.200.000	11 Unit	37.200.000	367 %	90 %	Kel. Sukabakti

Kode	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II								
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7		8		9		12 = 8+9+10+11		13 = 6+12		14 = 13/5x100 %		15
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Kel Binong	3 Unit	37.920.190	3 Unit	31.550.000	30 Unit	37.350.000	0 Unit	-	10 Unit	22.350.000	10 Unit	22.350.000	13 Unit	53.900.000	433 %	142%	Kel. Binong
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yangDipelihara Kel Curug Kulon	3 Unit	26.540.140	3 Unit	19.200.000	27 Unit	26.150.000	27 Unit	26.150.000	0 Unit	-	27 Unit	26.150.000	30 Unit	45.350.000	100 0%	171%	Kel. Curug Kulon
7.01.01.2.09.09	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Keluaran	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	676.212.019	3 Unit	249.000.000	3 Unit	823.966.339	1 Unit	446.224.600	2 Unit	-	3 Unit	446.224.600	6 Unit	695.224.600	150 %	103%	Kec. Curug
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Kel Sukabakti	1 Unit	173.957.760	1 Unit	133.620.000	1 Unit	59.293.700	0 Unit	-	1 Unit	-	1 Unit	-	2 Unit	133.620.000	200 %	77%	Kel. Sukabakti
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi kel Binong	1 Unit	136.840.320	1 Unit	112.537.125	1 Unit	59.255.700	0 Unit	-	1 Unit	59.154.900	1 Unit	59.154.900	2 Unit	171.692.025	200 %	125%	Kel. Binong

Kode	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II								
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7		8		9		12 = 8+9+10+11		13 = 6+12		14 = 13/5x100 %		15
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Kel Curug Kulon	1 Unit	90.961.920	1 Unit	51.090.000	1 Unit	80.630.600	0 Unit	-	1 Unit	80.517.600	1 Unit	80.517.600	2 Unit	131.607.600	200 %	145%	Kel. Curug Kulon
7.01.02	**Meningkatnya PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Capaian Program**	**Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik Kecamatan Curug**	**98,5 Persen**	**5.198.915.044**	**98,15 Persen**	**18.507.016.117**	**98,30 Persen**	**12.622.836.700**	**25%**	**2.059.673.700**	**33,15%**	**3.290.022.100**	**58%**	**5.349.695.800**	**156,3%**	**23.856.711.917**	**159 %**	**459%**	
				Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar Kecamatan Curug	**85 Persen**	**2.533.890.603**	**83 Persen**	**1.763.662.800**	**84 Persen**	**2.233.451.500**	**20%**	**510.039.500**	**23%**	**439.445.000**	**43%**	**949.484.500**	**126,0%**	**2.713.147.300**	**148 %**	**107%**	
7.01.02.2.02	**Meningkatnya Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang**	**Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang**	**Keluaran**	**Tersedianya pemenuhan sarana dan prasarana Paten di Kecamatan**	**6 Laporan**	**2.533.890.603**	**6 Laporan**	**1.763.662.800**	**1 Laporan**	**2.233.451.500**	**0,5 Laporan**	**510.039.500**	**1 Laporan**	**439.445.000**	**1,5 Laporan**	**949.484.500**	**7,5 Laporan**	**2.713.147.300**	**125 %**	**107%**	

Kode	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II								
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7		8		9		12 = 8+9+10+11		13 = 6+12		14 = 13/5x100 %		15
	Ada di Kecamatan	**Ada di Kecamatan**																			
			Hasil	**Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar Kecamatan Curug**	**85%**		**83%**		**84%**												
7.01.02.2.02.03	Terlaksananya Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Sub kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Keluaran	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6 Laporan	380.642.249	2 Laporan	178.048.000	1 Laporan	13.332.000	0 Laporan	-	0 Laporan	-	0 Laporan	-	2 Laporan	178.048.000	33 %	47 %	Kec. Curug
				Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan kel Sukabakti	6 Laporan	570.378.240	2 Laporan	427.100.000	4 Laporan	583.790.000	1 Laporan	133.320.000	1 Laporan	98.440.000	2 Laporan	231.760.000	4 Laporan	658.860.000	67 %	11 6%	Kel. Sukabakti

Kode	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II								
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7		8		9		12 = 8+9+10+11		13 = 6+12		14 = 13/5x100 %		15
				Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kel Binong	7 Laporan	1.083.045.946	3 Laporan	883.054.800	3 Laporan	1.220.586.000	1 Laporan	294.100.000	1 Laporan	198.500.000	2 Laporan	492.600.000	5 Laporan	1.375.654.800	71 %	127%	Kel. Binong
				Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kel Curug Kulon	6 Laporan	499.824.169	2 Laporan	275.460.000	2 Laporan	415.743.500	1 Laporan	82.619.500	1 Laporan	142.505.000	2 Laporan	225.124.500	4 Laporan	500.584.500	67 %	100%	Kel. Curug Kulon
7.01.02.2.03	**Meningkatnya Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**	**Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**	**Keluaran**	**Jumlah infrastruktur yang dipelihara**	**25 Titik**	**5.198.915.044**	**30 Titik**	**18.507.016.117**	**35 Titik**	**12.622.836.700**	**8 Titik**	**2.059.673.700**	**8 Titik**	**3.290.022.100**	**16 Titik**	**5.349.695.800**	**46 Titik**	**23.856.711.917**	**184 %**	**459%**	
			Hasil	**Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik**	**99%**		**98%**		**98.3%**												

Kode	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II								
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7		8		9		12 = 8+9+10+11		13 = 6+12		14 = 13/5x100 %		15
7.01.02.2.03.01	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalamPemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalamPemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Keluaran	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	55 Dokumen	5.198.915.044	45 Dokumen	18.507.016.117	35 Dokumen	12.622.836.700	10 Dokumen	2.059.673.700	10 Dokumen	3.290.022.100	20 Dokumen	5.349.695.800	65 Dokumen	23.856.711.917	118 %	45 9%	Kec. Curug
7.01.03	**Meningkatnya PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Capaian Program**	**Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaa Kec. Curug**	**80,50 Persen**	**5.347.494.919**	**79 Persen**	**3.648.094.756**	**80 Persen**	**3.445.967.000**	**15%**	**614.850.000**	**24%**	**525.751.000**	**39%**	**1.140.601.000**	**118,0%**	**4.788.695.756**	**147 %**	**90 %**	
7.01.03.2.01	**Meningkatnya Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Keluaran**	**Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan/pemberdayaa**	**30 Kelompok**	**1.141.974.195**	**25 Kelompok**	**865.237.900**	**25 Kelompok**	**1.423.867.800**	**5 Kelompok**	**399.771.000**	**5 Kelompok**	**237.566.000**	**10 Kelompok**	**637.337.000**	**35 Kelompok**	**1.502.574.900**	**117 %**	**13 2%**	

Kode	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II								
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7		8		9		12 = 8+9+10+11		13 = 6+12		14 = 13/5x100 %		15
			Hasil	Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	100%		100%		100%												
7.01.03.2.01.03	Terlaksananya Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Sumber Pendanaan	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Sumber Pendanaan	Keluaran	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10 Laporan	1.027.617.999	8 Laporan	801.105.300	12 Laporan	1.327.589.800	3 Laporan	326.989.000	3 Laporan	224.270.000	6 Laporan	551.259.000	14 Laporan	1.352.364.300	140 %	132%	Kec. Curug

Kode	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II								
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7		8		9		12 = 8+9+10+11		13 = 6+12		14 = 13/5x100 %		15
7.01.03.2.01.01	Terlaksananya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Keluaran	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	8 Lembaga	114.356.196	6 Lembaga	64.132.600	6 Lembaga	96.278.000	6 Lembaga	72.782.000	0 Lembaga	13.296.000	6 Lembaga	86.078.000	12 Lembaga	150.210.600	150 %	13 1%	Kec. Curug
7.01.03.2.02	**Meningkatnya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Keluaran**	**Jumlah sarana dan prasarana Kelurahan yang dibangun**	**60 Titik**	**4.205.520.724**	**55 Titik**	**2.782.856.856**	**55 Titik**	**2.022.099.200**	**15 Titik**	**215.079.000**	**10 Titik**	**288.185.000**	**25 Titik**	**503.264.000**	**80 Titik**	**3.286.120.856**	**133 %**	**78 %**	
			Hasil	**Capaian Kinerja Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**100%**		**100%**		**100%**												

Kode	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II								
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7		8		9		12 = 8+9+10+11		13 = 6+12		14 = 13/5x100 %		15
7.01.03.2.02.01	TerlaksananyaPeningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Keluaran	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Sukabakti	3 Lembaga	30.667.970	3 Lembaga	20.239.600	3 Lembaga	9.760.000	3 Lembaga	9.760.000	0 Lembaga	-	3 Lembaga	9.760.000	6 Lembaga	29.999.600	200 %	98 %	Kel. Sukabakti
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Binong	3 Lembaga	33.797.173	3 Lembaga	16.550.400	3 Lembaga	13.650.000	3 Lembaga	13.650.000	0 Lembaga	-	3 Lembaga	13.650.000	6 Lembaga	30.200.400	200 %	89 %	Kel. Binong

Kode	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II								
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7		8		9		12 = 8+9+10+11		13 = 6+12		14 = 13/5x100 %		15
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Curug Kulon	3 Lembaga	30.138.993	3 Lembaga	16.276.000	3 Lembaga	10.320.000	3 Lembaga	10.320.000	0 Lembaga	-	3 Lembaga	10.320.000	6 Lembaga	26.596.000	200 %	88 %	Kel. Curug Kulon
7.01.03.2.02.02	TerlaksananyaPembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Keluaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Kel Sukabakti	27 Unit	827.446.788	23 Unit	250.329.990	25 Unit	164.578.500	0 Unit	-	0 Unit	-	0 Unit	-	23 Unit	250.329.990	85 %	30 %	Kel. Sukabakti
				Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Kel Binong	27 Unit	1.036.800.000	23 Unit	207.743.256	0 Unit	-	0 Unit	-	0 Unit	-	0 Unit	-	23 Unit	207.743.256	85 %	20 %	Kel. Binong

Kode	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II								
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7		8		9		12 = 8+9+10+11		13 = 6+12		14 = 13/5x100 %		15
				Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Kel Curug Kulon	27 Unit	604.800.000	23 Unit	414.109.310	4 Unit	230.682.100	0 Unit	-	0 Unit	-	0 Unit	-	23 Unit	414.109.310	85 %	68 %	Kel. Curug Kulon
7.01.03.2.02.03	TerlaksananyaPemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sukabakti	5 Pokmas	601.762.900	3 Pokmas	591.409.400	3 Pokmas	503.030.000	1 Pokmas	84.145.000	1 Pokmas	69.920.000	2 Pokmas	154.065.000	5 Pokmas	745.474.400	100 %	124%	Kel. Sukabakti
				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Binong	5 Pokmas	651.380.072	3 Pokmas	659.361.000	3 Pokmas	539.789.600	1 Pokmas	17.360.000	1 Pokmas	136.841.000	2 Pokmas	154.201.000	5 Pokmas	813.562.000	100 %	125%	Kel. Binong

Kode	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II								
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7		8		9		12 = 8+9+10+11		13 = 6+12		14 = 13/5x100 %		15
				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Curug Kulon	5 Pokmas	388.726.828	4 Pokmas	606.837.900	25 Pokmas	550.289.000	5 Pokmas	79.844.000	10 Pokmas	81.424.000	15 Pokmas	161.268.000	19 Pokmas	768.105.900	380 %	19 8%	Kel. Curug Kulon
7.01.04	**Meningkatnya PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Capaian Program**	**Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti**	**75 Persen**	**1.142.211.201**	**72,50 Persen**	**539.420.800**	**73 Persen**	**300.021.000**	**13%**	**42.948.000**	**20%**	**55.774.000**	**33%**	**98.722.000**	**105,0%**	**638.142.800**	**140 %**	**56 %**	
7.01.04.2.01	**Meningkatnya Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Keluaran**	**Jumlah kegiatan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan**	**9 Kali**	**1.142.211.201**	**7 Kali**	**539.420.800**	**12 Kali**	**300.021.000**	**3 Kali**	**42.948.000**	**3 Kali**	**55.774.000**	**6 Kali**	**98.722.000**	**13 Kali**	**638.142.800**	**144 %**	**56 %**	

Kode	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II								
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7		8		9		12 = 8+9+10+11		13 = 6+12		14 = 13/5x100 %		15
			Hasil	Prosentase potensi gangguan trantibum yang terlayani	100%		100%		100%												
7.01.04.2.01.01	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	9 Laporan	636.528.884	7 Laporan	168.012.300	12 Laporan	108.837.000	3 Laporan	12.270.000	3 Laporan	13.560.000	6 Laporan	25.830.000	13 Laporan	193.842.300	144 %	30 %	Kec. Curug

Kode	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II								
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7		8		9		12 = 8+9+10+11		13 = 6+12		14 = 13/5x100 %		15
				Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kel Sukabakti	7 Laporan	109.769.276	5 Laporan	82.816.400	5 Laporan	58.320.000	1 Laporan	8.020.000	2 Laporan	11.750.000	3 Laporan	19.770.000	8 Laporan	102.586.400	114 %	93 %	Kel. Sukabakti

Kode	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II								
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7		8		9		12 = 8+9+10+11		13 = 6+12		14 = 13/5x100 %		15
				Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan kel Binong	7 Laporan	193.403.544	5 Laporan	135.238.100	5 Laporan	35.264.000	1 Laporan	8.098.000	2 Laporan	4.904.000	3 Laporan	13.002.000	8 Laporan	148.240.100	114 %	77 %	Kel. Binong

Kode	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II								
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7		8		9		12 = 8+9+10+11		13 = 6+12		14 = 13/5x100 %		15
				Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kel Curug Kulon	7 Laporan	202.509.496	5 Laporan	153.354.000	5 Laporan	97.600.000	1 Laporan	14.560.000	2 Laporan	25.560.000	3 Laporan	40.120.000	8 Laporan	193.474.000	114 %	96 %	Kel. Curug Kulon
7.01.06	**Meningkatnya PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Capaian Program**	**Presentase Desa Dengan Laporan Administrasi baik**	**89,45 Persen**	**373.710.567**	**89,15 Persen**	**180.602.000**	**89,30 Persen**	**92.698.400**	**20%**	**-**	**25%**	**5.005.000**	**45%**	**5.005.000**	**134,2%**	**185.607.000**	**150 %**	**50 %**	

Kode	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II								
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7		8		9		12 = 8+9+10+11		13 = 6+12		14 = 13/5x100 %		15
5.1.01.01	**Meningkatnya Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Sub Kegiatan**	**Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Sub Kegiatan**	**Keluaran**	**Jumlah Desa yang difasilitasi**	**4 Desa**	**373.710.567**	**4 Desa**	**180.602.000**	**4 Desa**	**92.698.400**	**0 Desa**	-	**2 Desa**	**5.005.000**	**4 Desa**	**5.005.000**	**8 Desa**	**185.607.000**	**200 %**	**50 %**	
			Hasil	**Prosentase desa dengan laporan keuangan baik**	**100%**		**100%**		**100%**												
5.1.01.01.01	Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Keluaran	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	5 Dokumen	373.710.567	7 Dokumen	180.602.000	4 Dokumen	92.698.400	0 Dokumen	-	1 Dokumen	5.005.000	1 Dokumen	5.005.000	8 Dokumen	185.607.000	160 %	50 %	Kec. Curug

Kode	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II								
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7		8		9		12 = 8+9+10+11		13 = 6+12		14 = 13/5x100 %		15
7.1.6.01	Meningkatnya PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Capaian Program	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	83 Persen	216.000.000	80 Persen	502.870.900	81 Persen	350.521.500	20%	18.960.000	20%	9.480.000	40%	28.440.000	120,0%	531.310.900	145 %	24 6%	
7.1.6.01.2.09	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Keluaran	Jumlah Orang yang mengikuti pembinaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	5 Jenis	216.000.000	3 Jenis	502.870.900	3 Jenis	350.521.500	1 Jenis	18.960.000	1 Jenis	9.480.000	2 Jenis	28.440.000	5 Jenis	531.310.900	100 %	24 6%	

Kode	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II								
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7		8		9		12 = 8+9+10+11		13 = 6+12		14 = 13/5x100 %		15
			Hasil	Persentase Orang yang mengikuti pembinaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	83%		80%		81%												

7.01.05.2.01.01	TerlaksananyaPembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Keluaran	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	60 Orang	72.000.000	50 Orang	257.674.000	50 Orang	247.571.500	0 Orang	-	0 Orang	-	0 Orang	-	50 Orang	257.674.000	83 %	35 8%	Kec. Curug
7.01.05.2.01.04	TerlaksananyaPembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Keluaran	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	60 Orang	72.000.000	50 Orang	40.396.300	50 Orang	15.110.000	0 Orang	-	50 Orang	-	50 Orang	-	100 Orang	40.396.300	167 %	56 %	Kec. Curug

Kode	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II								
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7		8		9		12 = 8+9+10+11		13 = 6+12		14 = 13/5x100 %		15
7.01.05.2.01.08	TerlaksananyaPelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Keluaran	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	60 Dokumen	72.000.000	50 Dokumen	204.800.600	12 Dokumen	87.840.000	3 Dokumen	18.960.000	3 Dokumen	9.480.000	6 Dokumen	28.440.000	56 Dokumen	233.240.600	93 %	32 4%	Kec. Curug
TOTAL						**32.520.517.480**		**39.990.742.807**		**35.626.325.061**		**7.363.863.035**		**7.984.007.919**		**15.347.870.954**		**55.338.613.761**			

Berdasarkan tabel 1 di atas, berikut analisis dari tabel tersebut :

a. Realisasi yang belum memenuhi target kinerja :
    1. Terdapat beberapa realisasi kinerja yang belum tercapai sampai dengan triwulan II ini yaitu :
        a. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
        b. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
        c. Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
        d. Kegiatan a. Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
    2. **Faktor penyebab** yang dihadapi sampai dengan triwulan II sejauh ini:
        a. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, adanya beberapa kegiatan yang belum dilaksanakan karena belum sepenuhnya berakhir periode pada triwulan II ini, sehingga berdasarkan tabel 1 di atas merupakan hasil analisis per tanggal 13 Juni 2025.
        b. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan, adanya beberapa kegiatan yang belum dilaksanakan karena belum sepenuhnya berakhir periode pada triwulan II ini, sehingga berdasarkan tabel 1 di atas merupakan hasil analisis per tanggal 13 Juni 2025.
        c. Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan, adanya beberapa kegiatan yang belum dilaksanakan karena belum sepenuhnya berakhir periode pada triwulan II ini, sehingga berdasarkan tabel 1 di atas merupakan hasil analisis per tanggal 13 Juni 2025.
        d. Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum, dikarenakan adanya perubahan titik lokasi kegiatan di beberapa judul fisik sehingga pekerjaan tidak dapat dilaksanakan dan harus menunggu APBD Perubahan.
    3. **Upaya Perbaikan** yang dapat dilakukan untuk mengatasi hal ini adalah :
        a. Memonitoring dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan apa saja yang belum sehingga bisa segera dilaksanakan dan dicairkan, karena kebijakan baru mengenai capaian kinerja yang tidak boleh dibawah 80% akan mempengaruhi nilai Tunjangan Kinerja, sehingga harus lebih maksimal dalam memonitoring.
        b. Segera berkoordinasi untuk perubahan judul kegiatan agar dapat dibuatkan rekapannya sehingga pada saat pembukaan APBD-P bisa langsung memperbaiki.

c. Realisasi yang telah memenuhi target kinerja :
    1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, seluruh kegiatan terserap dengan baik dan sesuai anggaran kas.
    2. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa sudah

mencapai target kinerja 4 desa yang dilakukan pengasawan dan pembinaan sampai dengan triwulan II ini sudah melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap 4 desa tersebut.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Curug

Perangkat Daerah Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang, merupakan Lembaga Teknis Daerah sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah dalam perencanaan pembangunan. Pencanangan pembangunan yang berkualitas dan professional dapat menjadi wahana untuk memperbaiki pola pembangunan di tingkat daerah, sehingga daerah dapat berkiprah dengan leluasa untuk membangun daerahnya sesuai potensi dan kemampuan yang ada (potensi lokal).

Perangkat Daerah Kecamatan Curug yang berfungsi sebagai Perangkat Daerah Koordinatif dan Pelayanan masyarakat mempunyai tujuan utamanya adalah untuk kepuasan pelayanan masyarakat secara umum, capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Curug dapat dicapai bila Indeks Kepuasan Masyarakat tercapai sesuai dengan target. Untuk mendapatkan kepuasan Masyarakat dengan Indeks Kepuasan Masyarakat yang tinggi perlu adanya Standar Pelayanan Minimal (SPM) karena SPM merupakan tolok ukur bagi aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.





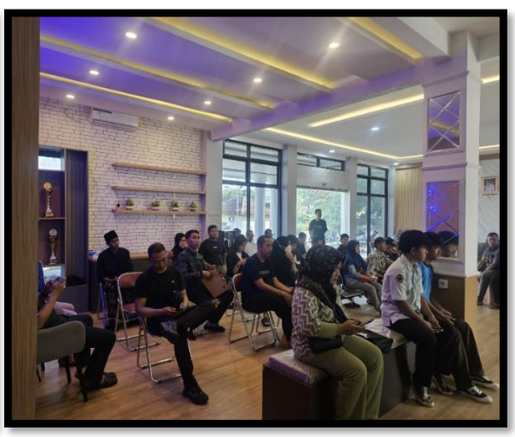

Kegiatan pelayanan di Kecamatan Curug tidak hanya memberikan sarana dan prasarana yang baik untuk masyarakat,

namun juga memberikan pelayanan prima dan melakukan berbagi pelayanan tambahan seperti sosialisasi, pengarahan dan edukasi secara offline maupun online.

Adapun beberapa hal yang perlu dilakukan untuk keberhasilan pelaksanaan dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, antara lain :

1. Memberikan pelatihan bagi pegawai sesuai dengan bidang tugasnya.
2. Meningkatkan sistem pelayanan di kecamatan curug dengan cara berkoordinasi dengan Dinas terkait.
3. Meningkatkan kualitas ruang pelayanan untuk meningkatkan kenyamanan dan kebersihan ruang pelayanan (*welcome drink, coffe maker, AC*)
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

Pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Curug dapat dilihat sebagaimana Tabel 3 berikut :

Tabel 2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Curug
Kabupaten Tangerang

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Satuan	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
					2022	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	80	82	83	84	85,12	83,12	83,5	84	Telah sesuai target dan melebihi capaian target Renstra PD
2	Nilai AKIP Kecamatan Curug	Nilai AKIP	Hasil Nilai AKIP	Angka	78	80	80,5	81	71,85	75,25	-	-	▪ Di Tahun 2023 mengalami penurunan nilai dikarenakan adanya kebijakan baru penilaian dari tim Inspektorat ▪ Nilai AKIP pada Renstra baru 2025-2030 tidak menjadi IKU lagi.
3	Presentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Presentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Hasil Presentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Presentase	65	62	-	-	62	-	-	-	Telah sesuai target namun di Tahun 2024 sudah tidak menjadi standar indikator kinerja utama kecamatan

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu penyelenggaraan tugas dan fungsi yang ada di Kecamatan Curug antara lain sebagai berikut:

1. Masih banyaknya tingkat stunting dan keluarga berisiko stunting di wilayah kecamatan curug.
2. Masih adanya beberapa wilayah rawan banjir di wilayah kecamatan curug.
3. Perlunya peningkatan dan pengembangan UMKM di wilayah curug guna memberdayakan produk dalam negeri.
4. Masih kurangnya sarana dan prasarana pelayanan publik guna

mendukung pelaksanaan pelayanan publik yang bekualitas.
5. Masih banyaknya pelanggaran Perda tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum.
6. Masih banyaknya infrastruktur dasar baik jalan, jembatan, saluran drainase, sarana pendidikan dan sarana kesehatan yang kurang baik dan mendesak untuk dibangun.
7. Masih minimnya kepedulian masyarakat tentang kebersihan dan persampahan.

Untuk menjawab isu isu di kecamatan curug maka dibentuklah beberapa kebijakan perencanaan kegiatan di kecamatan curug adalah sebagai berikut :

1. Operasional Forum Komunikasi Kecamatan Sehat (FKKS) berupa perlengkapan administrasi, rapat-rapat dan pembinaan, pendampingan lapangan.
2. Gerakan Bersama Atasi Kemiskinan Ekstream dan Stunting (Gebrak Tegas) Pencegahan dan penurunan Stunting dan penghapusan kemiskinan ekstream berupa Pemberian Makanan Tambahan (PMT) balita Stunting, rembuk stunting.
3. Penyelenggaraan pemberdayaan keluarga prasejahtera.
4. Verifikasi dan validasi data pengangguran.
5. Kecamatan tanggap bencana dan penanganan pasca bencana.
6. Pengembangan Produk Unggulan Kecamatan, pojok UMKM di Kecamatan dan Pembinaan UMKM.
7. Pengembangan Inovasi Kecamatan.
8. Pengembangan Kampung Tematik.
9. Penyediaan RTH (Ruang Terbuka Hijau).
10. Rehabilitasi RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) dan Rehabilitas yang terdampak bencana.
11. Pengangkutan sampah dari tempat pembuangan sampah sementara sampai tiba di tempat pembuangan sampah di akhir untuk wilayah sekitar jalan desa/kelurahan.

2.4 Review Terhadap Rancangan RKPD Perubahan

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Curug Tahun 2025 merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam arah kebijakan RPJPD Kabupaten Tangerang tahun 2024-2026 yang dijabarkan dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026. Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Kecamatan Curug Tahun 2025 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017.

Dalam konteks perencanaan pembangunan, Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan, melayani/memenuhi kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, dalam era globalisasi, Kecamatan Curug dituntut untuk siap dan sanggup membuat/menyusun suatu perencanaan yang baik, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Untuk lebih jelasnya mengenai review rancangan RKPD Perubahan Tahun 2025 dapat dilihat Tabel 3 Bberikut ini:

Tabel 3.
Review Terhadap Rancangan RKPD Perubahan Tahun 2025
Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang

No.	RKPD Perubahan 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	KECAMATAN CURUG				**36.007.430.139,00**	**KECAMATAN CURUG**				**36.007.430.139,00**	
	UNSUR KEWILAYAHAN				**36.007.430.139,00**	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**36.007.430.139,00**	
	KECAMATAN				**29.199.414.439,00**	**KECAMATAN**				**29.199.414.439,00**	
1,	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**		**Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan**	**100 Persen**	**14.517.321.039,00**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**		**Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan**	**100 Persen**	**14.517.321.039,00**	
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		*Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	7 Dokumen	140.028.000,00	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		*Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	7 Dokumen	140.028.000,00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Tangerang, Curug, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	4 Dokumen	70.522.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Tangerang, Curug, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	4 Dokumen	70.522.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Tangerang, Curug, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	2 Laporan	31.122.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Tangerang, Curug, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	2 Laporan	31.122.000,00	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Tangerang, Curug, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	1 Laporan	38.384.000,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Tangerang, Curug, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	1 Laporan	38.384.000,00	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		*Jumlah laporan keuangan*	1 Dokumen	10.304.036.291,00	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		*Jumlah laporan keuangan*	1 Dokumen	10.304.036.291,00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Tangerang, Curug, Semua Kel/Desa	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	41 Orang /bulan	10.275.281.291,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Tangerang, Curug, Semua Kel/Desa	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	41 Orang /bulan	10.275.281.291,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Tangerang, Curug, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD*	2 Laporan	28.755.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Tangerang, Curug, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD*	2 Laporan	28.755.000,00	
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		*Jumlah pegawai yang difasilitas*	41 orang	169.562.000,00	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		*Jumlah pegawai yang difasilitas*	41 orang	169.562.000,00	

No.	RKPD Perubahan 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapanny a	Kab. Tangerang, Curug, Semua Kel/Desa	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*	41 Paket	84.878.000 ,00	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapanny a	Kab. Tangerang, Curug, Semua Kel/Desa	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*	41 Paket	84.878.000 ,00	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Tangerang, Curug, Semua Kel/Desa	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*	100 Orang	84.684.000 ,00	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Tangerang, Curug, Semua Kel/Desa	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*	100 Orang	84.684.000 ,00	
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		*Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah*	8 jenis	1.420.842. 400,00	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		*Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah*	8 jenis	1.420.842. 400,00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor	Kab. Tangerang, Curug, Semua Kel/Desa	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor yang Disediakan*	4 Paket	23.425.500 ,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor	Kab. Tangerang, Curug, Semua Kel/Desa	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor yang Disediakan*	4 Paket	23.425.500 ,00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Tangerang, Curug, Semua Kel/Desa	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	12 Paket	961.468.80 0,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Tangerang, Curug, Semua Kel/Desa	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	12 Paket	961.468.80 0,00	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Tangerang, Curug, Semua Kel/Desa	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*	12 Paket	50.833.000 ,00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Tangerang, Curug, Semua Kel/Desa	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*	12 Paket	50.833.000 ,00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Tangerang, Curug, Semua Kel/Desa	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	48 Paket	105.222.10 0,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Tangerang, Curug, Semua Kel/Desa	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	48 Paket	105.222.10 0,00	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Tangerang, Curug, Semua Kel/Desa	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	4 Paket	101.560.00 0,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Tangerang, Curug, Semua Kel/Desa	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	4 Paket	101.560.00 0,00	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Tangerang, Curug, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	12 Laporan	97.960.000 ,00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Tangerang, Curug, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	12 Laporan	97.960.000 ,00	
	Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Tangerang, Curug, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	4 Laporan	80.373.000 ,00	Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Tangerang, Curug, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	4 Laporan	80.373.000 ,00	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		*Tersedianya Jasa Penunjang*	4 jenis	1.259.775. 269,00	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		*Tersedianya Jasa Penunjang*	4 jenis	1.259.775. 269,00	

No.	RKPD Perubahan 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Tangerang, Curug, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	12 Laporan	11.771.400,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Tangerang, Curug, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	12 Laporan	11.771.400,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Tangerang, Curug, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	5 Laporan	136.738.301,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Tangerang, Curug, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	5 Laporan	136.738.301,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Tangerang, Curug, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	12 Laporan	1.111.265.568,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Tangerang, Curug, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	12 Laporan	1.111.265.568,00	
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		*Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	4 jenis	1.223.077.079,00	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		*Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	4 jenis	1.223.077.079,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Tangerang, Curug, Semua Kel/Desa	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*	1 Unit	54.181.192,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Tangerang, Curug, Semua Kel/Desa	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*	1 Unit	54.181.192,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Tangerang, Curug, Semua Kel/Desa	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	3 Unit	312.229.548,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Tangerang, Curug, Semua Kel/Desa	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	3 Unit	312.229.548,00	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Tangerang, Curug, Semua Kel/Desa	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	28 Unit	32.700.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Tangerang, Curug, Semua Kel/Desa	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	28 Unit	32.700.000,00	
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Tangerang, Curug, Semua Kel/Desa	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	3 Unit	823.966.339,00	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Tangerang, Curug, Semua Kel/Desa	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	3 Unit	823.966.339,00	
2,	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		**Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar Kecamatan Curug Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik Kecamatan Curug**	**84 98,30 Persen Persen**	**12.706.168.700,00**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		**Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar Kecamatan Curug Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik Kecamatan Curug**	**84 98,30 Persen Persen**	**12.706.168.700,00**	
	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		*Tersedianya pemenuhan sarana dan prasarana Paten di Kecamatan*	1 Unit	13.332.000,00	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		*Tersedianya pemenuhan sarana dan prasarana Paten di Kecamatan*	1 Unit	13.332.000,00	

No.	RKPD Perubahan 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Tangerang, Curug, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	1 Laporan	13.332.000,00	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Tangerang, Curug, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	1 Laporan	13.332.000,00	
	Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum		*Jumlah infrastruktur yang dipelihara*	35 Titik	12.692.836.700,00	Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum		*Jumlah infrastruktur yang dipelihara*	35 Titik	12.692.836.700,00	
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kab. Tangerang, Curug, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum*	35 Dokumen	12.692.836.700,00	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kab. Tangerang, Curug, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum*	35 Dokumen	12.692.836.700,00	
3,	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		**Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaa Kec. Curug**	**80 Persen**	**1.423.867.800,00**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		**Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaa Kec. Curug**	**80 Persen**	**1.423.867.800,00**	
	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		*Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan/pemberdayaan*	25 kelompok	1.423.867.800,00	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		*Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan/pemberdayaan*	25 kelompok	1.423.867.800,00	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kab. Tangerang, Curug, Semua Kel/Desa	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa*	6 Lembaga Kemasyarakatan	96.278.000,00	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kab. Tangerang, Curug, Semua Kel/Desa	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa*	6 Lembaga Kemasyarakatan	96.278.000,00	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Tangerang, Curug, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	12 Laporan	1.327.589.800,00	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Tangerang, Curug, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	12 Laporan	1.327.589.800,00	
4,	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		**Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti**	**73 Persen**	**108.837.000,00**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		**Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti**	**73 Persen**	**108.837.000,00**	
	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		*Jumlah kegiatan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan*	12 Kali	108.837.000,00	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		*Jumlah kegiatan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan*	12 Kali	108.837.000,00	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kab. Tangerang, Curug, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan*	12 Laporan	108.837.000,00	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kab. Tangerang, Curug, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan*	12 Laporan	108.837.000,00	

No.	RKPD Perubahan 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5,	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		**Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti**	**81 Persen**	**350.521.500,00**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		**Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti**	**81 Persen**	**350.521.500,00**	
	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		*Jumlah Orang yang mengikuti pembinaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah*	3 jenis	350.521.500,00	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		*Jumlah Orang yang mengikuti pembinaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah*	3 jenis	350.521.500,00	
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kab. Tangerang, Curug, Semua Kel/Desa	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia*	50 Orang	247.571.500,00	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kab. Tangerang, Curug, Semua Kel/Desa	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia*	50 Orang	247.571.500,00	
	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kab. Tangerang, Curug, Semua Kel/Desa	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa*	50 Orang	15.110.000,00	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kab. Tangerang, Curug, Semua Kel/Desa	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa*	50 Orang	15.110.000,00	
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kab. Tangerang, Curug, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan*	12 Dokumen	87.840.000,00	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kab. Tangerang, Curug, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan*	12 Dokumen	87.840.000,00	
6,	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**		**Presentase Desa Dengan Laporan Administrasi baik**	**89,30 Persen**	**92.698.400,00**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**		**Presentase Desa Dengan Laporan Administrasi baik**	**89,30 Persen**	**92.698.400,00**	
	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		*Jumlah Desa yang difasilitasi*	4 desa	92.698.400,00	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		*Jumlah Desa yang difasilitasi*	4 desa	92.698.400,00	
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kab. Tangerang, Curug, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa*	4 Dokumen	92.698.400,00	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kab. Tangerang, Curug, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa*	4 Dokumen	92.698.400,00	
	KELURAHAN SUKABAKTI				**2.222.724.950,00**	**KELURAHAN SUKABAKTI**				**2.222.724.950,00**	
1,	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan**	**100 Persen**	**903.246.450,00**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan**	**100 Persen**	**903.246.450,00**	

No.	RKPD Perubahan 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		*Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah*	8 jenis	269.905.950,00	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		*Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah*	8 jenis	269.905.950,00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Tangerang, Curug, Sukabakti	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	4 Paket	12.638.400,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Tangerang, Curug, Sukabakti	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	4 Paket	12.638.400,00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Tangerang, Curug, Sukabakti	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	14 Paket	149.797.500,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Tangerang, Curug, Sukabakti	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	14 Paket	149.797.500,00	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Tangerang, Curug, Sukabakti	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*	10 Paket	16.857.100,00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Tangerang, Curug, Sukabakti	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*	10 Paket	16.857.100,00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Tangerang, Curug, Sukabakti	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	25 Paket	43.325.550,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Tangerang, Curug, Sukabakti	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	25 Paket	43.325.550,00	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Tangerang, Curug, Semua Kel/Desa	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	5 Paket	20.172.400,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Tangerang, Curug, Semua Kel/Desa	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	5 Paket	20.172.400,00	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Tangerang, Curug, Sukabakti	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	12 Laporan	17.215.000,00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Tangerang, Curug, Sukabakti	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	12 Laporan	17.215.000,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Tangerang, Curug, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	3 Laporan	9.900.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Tangerang, Curug, Semua Kel/Desa	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	3 Laporan	9.900.000,00	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		*Tersedianya Jasa Penunjang*	4 jenis	545.846.800,00	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		*Tersedianya Jasa Penunjang*	4 jenis	545.846.800,00	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Tangerang, Curug, Sukabakti	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	12 Laporan	2.236.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Tangerang, Curug, Sukabakti	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	12 Laporan	2.236.000,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Tangerang, Curug, Sukabakti	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	12 Laporan	96.094.800,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Tangerang, Curug, Sukabakti	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	12 Laporan	96.094.800,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Tangerang, Curug, Sukabakti	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	12 Laporan	447.516.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Tangerang, Curug, Sukabakti	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	12 Laporan	447.516.000,00	
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		*Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	5 jenis	87.493.700,00	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		*Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	5 jenis	87.493.700,00	

No.	RKPD Perubahan 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Tangerang, Curug, Sukabakti	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	16 Unit	28.200.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Tangerang, Curug, Sukabakti	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	16 Unit	28.200.000,00	
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Tangerang, Curug, Sukabakti	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	1 Unit	59.293.700,00	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Tangerang, Curug, Sukabakti	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	1 Unit	59.293.700,00	
2,	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		**Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar Kecamatan Curug Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik Kecamatan Curug**	**84 98,30 Persen Persen**	**583.790.000,00**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		**Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar Kecamatan Curug Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik Kecamatan Curug**	**84 98,30 Persen Persen**	**583.790.000,00**	
	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		*Tersedianya pemenuhan sarana dan prasarana Paten di Kecamatan*	6 unit	583.790.000,00	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		*Tersedianya pemenuhan sarana dan prasarana Paten di Kecamatan*	6 unit	583.790.000,00	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Tangerang, Curug, Sukabakti	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	4 Laporan	583.790.000,00	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Tangerang, Curug, Sukabakti	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	4 Laporan	583.790.000,00	
3,	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		**Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaa Kec. Curug**	**80 Persen**	**677.368.500,00**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		**Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaa Kec. Curug**	**80 Persen**	**677.368.500,00**	
	Kegiatan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		*Jumlah sarana dan prasarana Kelurahan yang dibangun*	55 titik	677.368.500,00	Kegiatan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		*Jumlah sarana dan prasarana Kelurahan yang dibangun*	55 titik	677.368.500,00	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kab. Tangerang, Curug, Sukabakti	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan*	3 Lembaga Kemasyarakatan	9.760.000,00	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kab. Tangerang, Curug, Sukabakti	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan*	3 Lembaga Kemasyarakatan	9.760.000,00	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kab. Tangerang, Curug, Sukabakti	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*	25 Unit	164.578.500,00	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kab. Tangerang, Curug, Sukabakti	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*	25 Unit	164.578.500,00	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kab. Tangerang, Curug, Sukabakti	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*	3 Pokmas / Ormas	503.030.000,00	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kab. Tangerang, Curug, Sukabakti	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*	3 Pokmas / Ormas	503.030.000,00	
4,	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		**Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti**	**73 Persen**	**58.320.000,00**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		**Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti**	**73 Persen**	**58.320.000,00**	
	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		*Jumlah kegiatan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan*	7 kali	58.320.000,00	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		*Jumlah kegiatan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan*	7 kali	58.320.000,00	

No.	RKPD Perubahan 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kab. Tangerang, Curug, Sukabakti	*Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan*	5 Laporan	58.320.000,00	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kab. Tangerang, Curug, Sukabakti	*Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan*	5 Laporan	58.320.000,00	
	KELURAHAN BINONG				**2.584.949.000,00**	**KELURAHAN BINONG**				**2.584.949.000,00**	
1,	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**		**Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan**	**100 Persen**	**775.659.400,00**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**		**Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan**	**100 Persen**	**775.659.400,00**	
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		*Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah*	8 jenis	196.876.700,00	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		*Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah*	8 jenis	196.876.700,00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Tangerang, Curug, Binong	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	4 Paket	5.523.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Tangerang, Curug, Binong	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	4 Paket	5.523.000,00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Tangerang, Curug, Binong	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	12 Paket	92.417.700,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Tangerang, Curug, Binong	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	12 Paket	92.417.700,00	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Tangerang, Curug, Binong	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*	10 Paket	6.612.500,00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Tangerang, Curug, Binong	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*	10 Paket	6.612.500,00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Tangerang, Curug, Binong	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	30 Paket	42.063.500,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Tangerang, Curug, Binong	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	30 Paket	42.063.500,00	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Tangerang, Curug, Binong	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	5 Paket	10.750.000,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Tangerang, Curug, Binong	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	5 Paket	10.750.000,00	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Tangerang, Curug, Binong	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	12 Laporan	29.610.000,00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Tangerang, Curug, Binong	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	12 Laporan	29.610.000,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Tangerang, Curug, Binong	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	3 Laporan	9.900.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Tangerang, Curug, Binong	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	3 Laporan	9.900.000,00	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		*Tersedianya Jasa Penunjang*	4 jenis	482.177.000,00	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		*Tersedianya Jasa Penunjang*	4 jenis	482.177.000,00	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Tangerang, Curug, Binong	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	12 Laporan	2.795.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Tangerang, Curug, Binong	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	12 Laporan	2.795.000,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Tangerang, Curug, Binong	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	12 Laporan	83.952.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Tangerang, Curug, Binong	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	12 Laporan	83.952.000,00	

No.	RKPD Perubahan 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			yang Disediakan					*yang Disediakan*			
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Tangerang, Curug, Binong	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	12 Laporan	395.430.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Tangerang, Curug, Binong	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	12 Laporan	395.430.000,00	
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		*Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	5 jenis	96.605.700,00	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		*Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	5 jenis	96.605.700,00	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Tangerang, Curug, Binong	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	30 Unit	37.350.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Tangerang, Curug, Binong	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	30 Unit	37.350.000,00	
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Tangerang, Curug, Binong	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	1 Unit	59.255.700,00	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Tangerang, Curug, Binong	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	1 Unit	59.255.700,00	
2,	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		**Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar Kecamatan Curug Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik Kecamatan Curug**	**84 98,30 Persen Persen**	**1.220.586.000,00**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		**Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar Kecamatan Curug Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik Kecamatan Curug**	**84 98,30 Persen Persen**	**1.220.586.000,00**	
	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		*Tersedianya pemenuhan sarana dan prasarana Paten di Kecamatan*	6 unit	1.220.586.000,00	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		*Tersedianya pemenuhan sarana dan prasarana Paten di Kecamatan*	6 unit	1.220.586.000,00	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Tangerang, Curug, Binong	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	3 Laporan	1.220.586.000,00	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Tangerang, Curug, Binong	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	3 Laporan	1.220.586.000,00	
3,	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		**Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaa Kec. Curug**	**80 Persen**	**553.439.600,00**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		**Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaa Kec. Curug**	**80 Persen**	**553.439.600,00**	
	Kegiatan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		*Jumlah sarana dan prasarana Kelurahan yang dibangun*	55 titik	553.439.600,00	Kegiatan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		*Jumlah sarana dan prasarana Kelurahan yang dibangun*	55 titik	553.439.600,00	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kab. Tangerang, Curug, Binong	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan*	3 Lembaga Kemasyarakatan	13.650.000,00	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kab. Tangerang, Curug, Binong	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan*	3 Lembaga Kemasyarakatan	13.650.000,00	

No.	RKPD Perubahan 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kab. Tangerang, Curug, Binong	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*	25 Unit	0,00	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kab. Tangerang, Curug, Binong	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*	25 Unit	0,00	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kab. Tangerang, Curug, Binong	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*	3 Pokmas / Ormas	539.789.600,00	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kab. Tangerang, Curug, Binong	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*	3 Pokmas / Ormas	539.789.600,00	
4,	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		**Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti**	**73 Persen**	**35.264.000,00**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		**Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti**	**73 Persen**	**35.264.000,00**	
	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		*Jumlah kegiatan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan*	7 Kali	35.264.000,00	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		*Jumlah kegiatan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan*	7 Kali	35.264.000,00	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kab. Tangerang, Curug, Binong	*Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan*	5 Laporan	35.264.000,00	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kab. Tangerang, Curug, Binong	*Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan*	5 Laporan	35.264.000,00	
	KELURAHAN CURUG KULON				**2.000.341.750,00**	**KELURAHAN CURUG KULON**				**2.000.341.750,00**	
1,	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**		**Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan**	**100 Persen**	**695.707.150,00**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**		**Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan**	**100 Persen**	**695.707.150,00**	
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		*Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah*	8 jenis	121.468.550,00	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		*Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah*	8 jenis	121.468.550,00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Tangerang, Curug, Curug Kulon	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	5 Paket	4.356.600,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Tangerang, Curug, Curug Kulon	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	5 Paket	4.356.600,00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Tangerang, Curug, Curug Kulon	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	6 Paket	21.792.000,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Tangerang, Curug, Curug Kulon	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	6 Paket	21.792.000,00	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Tangerang, Curug, Curug Kulon	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*	10 Paket	11.043.000,00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Tangerang, Curug, Curug Kulon	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*	10 Paket	11.043.000,00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Tangerang, Curug, Curug Kulon	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	12 Paket	27.214.950,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Tangerang, Curug, Curug Kulon	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	12 Paket	27.214.950,00	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Tangerang, Curug, Curug Kulon	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	10 Paket	11.972.000,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Tangerang, Curug, Curug Kulon	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	10 Paket	11.972.000,00	

No.	RKPD Perubahan 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Tangerang, Curug, Curug Kulon	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	12 Laporan	33.474.000,00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Tangerang, Curug, Curug Kulon	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	12 Laporan	33.474.000,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Tangerang, Curug, Curug Kulon	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	3 Laporan	11.616.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Tangerang, Curug, Curug Kulon	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	3 Laporan	11.616.000,00	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		*Tersedianya Jasa Penunjang*	4 jenis	467.458.000,00	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		*Tersedianya Jasa Penunjang*	4 jenis	467.458.000,00	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Tangerang, Curug, Curug Kulon	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	12 Laporan	8.648.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Tangerang, Curug, Curug Kulon	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	12 Laporan	8.648.000,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Tangerang, Curug, Curug Kulon	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	12 Laporan	39.380.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Tangerang, Curug, Curug Kulon	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	12 Laporan	39.380.000,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Tangerang, Curug, Curug Kulon	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	12 Laporan	419.430.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Tangerang, Curug, Curug Kulon	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	12 Laporan	419.430.000,00	
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		*Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	5 jenis	106.780.600,00	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		*Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	5 jenis	106.780.600,00	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Tangerang, Curug, Curug Kulon	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	27 Unit	26.150.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Tangerang, Curug, Curug Kulon	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	27 Unit	26.150.000,00	
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Tangerang, Curug, Curug Kulon	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	1 Unit	80.630.600,00	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Tangerang, Curug, Curug Kulon	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	1 Unit	80.630.600,00	
2,	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		**Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar Kecamatan Curug Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik Kecamatan Curug**	**84 98,30 Persen Persen**	**415.743.500,00**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		**Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar Kecamatan Curug Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik Kecamatan Curug**	**84 98,30 Persen Persen**	**415.743.500,00**	
	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		*Tersedianya pemenuhan sarana dan prasarana Paten di Kecamatan*	6 unit	415.743.500,00	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		*Tersedianya pemenuhan sarana dan prasarana Paten di Kecamatan*	6 unit	415.743.500,00	

No.	RKPD Perubahan 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Tangerang, Curug, Curug Kulon	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	2 Laporan	415.743.500,00	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Tangerang, Curug, Curug Kulon	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	2 Laporan	415.743.500,00	
3,	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		**Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaa Kec. Curug**	**80 Persen**	**791.291.100,00**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		**Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaa Kec. Curug**	**80 Persen**	**791.291.100,00**	
	Kegiatan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		*Jumlah sarana dan prasarana Kelurahan yang dibangun*	55 titik	791.291.100,00	Kegiatan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		*Jumlah sarana dan prasarana Kelurahan yang dibangun*	55 titik	791.291.100,00	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kab. Tangerang, Curug, Curug Kulon	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan*	3 Lembaga Kemasyarakatan	10.320.000,00	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kab. Tangerang, Curug, Curug Kulon	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan*	3 Lembaga Kemasyarakatan	10.320.000,00	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kab. Tangerang, Curug, Curug Kulon	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*	25 Unit	230.682.100,00	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kab. Tangerang, Curug, Curug Kulon	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*	25 Unit	230.682.100,00	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kab. Tangerang, Curug, Curug Kulon	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*	4 Pokmas / Ormas	550.289.000,00	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kab. Tangerang, Curug, Curug Kulon	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*	4 Pokmas / Ormas	550.289.000,00	
4,	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		**Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti**	**73 Persen**	**97.600.000,00**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		**Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti**	**73 Persen**	**97.600.000,00**	
	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		*Jumlah kegiatan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan*	7 Kali	97.600.000,00	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		*Jumlah kegiatan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan*	7 Kali	97.600.000,00	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kab. Tangerang, Curug, Curug Kulon	*Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan*	5 Laporan	97.600.000,00	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kab. Tangerang, Curug, Curug Kulon	*Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan*	5 Laporan	97.600.000,00	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

a. Bahwa Usulan Program / Kegiatan yang dibahas didalam musrenbang mekanismenya diawali dari penggalian gagasan dari tingkat Dusun/ Lingkungan melibatkan unsur Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Unsur Perempuan dan Organisasi Kemasyarakatan sehingga menghasilkan usulan program yang di bawa ke form Musrenbangdes. Pada form Musrenbangdes menghasilkan skala prioritas usulan tingkat Desa/ Kelurahan selanjutnya ditunjuk perwakilan dari Desa / Kelurahan untuk

mengawal usulan tersebut di Form Musrenbang Tingkat Kecamatan.

b. Hasil Musrenbang Kecamatan merupakan Skala prioritas program yang telah sesuai dengan kebutuhan *real* masyarakat serta isu - isu penting dari masing-masing Perangkat Daerah yang ada pada Unit Pelaksana Teknis di tingkat Kecamatan. Perangkat Daerah Kecamatan Curug sebagai fasilitator untuk menampung usulan dari Desa yang diumumkan ke Perangkat Daerah terkait. Berikut hasil penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat di wilayah Kecamatan Curug untuk Tahun 2025 :

Tabel 4 (T-C. 32)

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025

Kabupaten Tangerang

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Curug

NO	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator / Sasaran Kegiatan	Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
SUKABAKTI					
1	Pembangunan Gsg Kelurahan Sukabakti Rw. 13	Kelurahan Sukabakti	Memfasilitasi Kegiatan Masyarakat	1 PAKET	
2	Pengadaan Lahan Untuk Perlebaran Jl.Sapan Utama Raya Rw 10, 11, 13	Kelurahan Sukabakti	Memperlancar Lalu Lintas	1 PAKET	
3	Pengadaan Lahan Untuk Perluasan Smpn 1 Curug Rt. 01 / 05	Kelurahan Sukabakti	Untuk Meningkatkan Efektifitas Belajar Dan Mengajar	1 PAKET	
4	Pelatihan Manajemen Dan Permodalan Umkm Rw.13	Kelurahan Sukabakti	Meningkatkan Manajemen Terpadu Pelaku Usaha Mikro	1 PAKET	
5	Pembentukan Dan Pembinaan Bank Sampah Terpadu Rw. 13	Kelurahan Sukabakti	Pengelolaan Sampah Untuk Meningkatkan Dampak Ekonomi	1 PAKET	
6	Pembangunan Tandon Sukabakti	Kelurahan Sukabakti	Mencegah Terjadinya Banjir	1 PAKET	
BINONG					
7	Pembebasan Lahan Dan Pembangunan Utk Gsg Kelurahan; (Rt.05/03)	Kelurahan Binong	Memfasilitasi Kegiatan Masyarakat	1 PAKET	
8	Pengadaan Lahan Untuk Pelebaran Jalan Utama Binong	Kelurahan Binong	Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas	3m x 1.000	
9	Normalisasi Saluran Air Anak Kali Sabi Rt. 04/014	Kelurahan Binong	Mencegah Terjadinya Banjir	1 PAKET	
10	Pendopo/Joglo Kampung Kebhinekaan, Rw. 10	Kelurahan Binong	Menunjang Kegiatan Ekonomi Masyarakat	1 PAKET	

NO	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator / Sasaran Kegiatan	Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11	Penataan Pemakaman Binong Permai Rw.16 Berbatasan Dg Rw. 06 Babakan	Kelurahan Binong	Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas	1 PAKET	
12	Pembangunan Saluran Air Cijengir (Puskesmas Binong	Kecamatan Curug	Mencegah Terjadinya Banjir	50 CM X 500 M	
13	Pengalihan Puskesmas Binong Menjadi Balai Latihan Kerja	Kecamatan Curug	Penyerapan Tenaga Kerja Dan Penuntasan Pengangguran	1 PAKET	
14	Lanjutan Penataan Smpn 5 Curug	Kecamatan Curug	Meningkatkan Sdm Yang Berdaya Saing	1 PAKET	
15	Pembangunan Gerai Umkm Kelurahan Binong	Kelurahan Binong	Memaksimalkan Potensi Umkm	1 PAKET	
CURUG KULON					
16	Pembangunan Gedung Serba Guna Kelurahan Curug Kulon Rt. 04/02	Kp. Curug Kulon Rt. 04/02	Memfasilitasi Kegiatan Masyarakat	12 x 24 m	
17	Pembangunan Lapangan Mini Soccer Sintetis Outdoor (Sepak Bola Mini) Kelurahan Curug Kulon Rt.01/01	Kp. Curug Kulon Rt. 001/001	Meningkatkan Sdm Yang Berdaya Saing	4000 M2	
18	Pembangunan Gedung Umkm, Lpm Dan Kepemudaan Kelurahan Curug Kulon	Kp. Curug Kulon Rt. 04/02	Meningkatkan Perekonomian Masyarakat	12 x 12 (2 Lantai)	
19	Pembangunan Area Wisata Air Kel. Curug Kulon	Kelurahan Curug Kulon	Meningkatkan Perekonomian Masyarakat	1,5 Hektar	
20	Pemagaran Dan Penataan Makam Muslim Sirnagalih Rw. 6	Kelurahan Curug Kulon	Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas	1,6 Hektar	
21	LanjutanPenataan Alun-Alun Kecamatan Curug	Kecamatan Curug	Memfasilitasi Kegiatan Masyarakat	1 PAKET	
22	Penataan Pasar Burung	Alun-Alun Kecamatan Curug	Memaksimalkan Potensi Umkm	1 PAKET	
23	Pembangunan Perpustakaan Kecamatan Curug	Jl Raya Curug Kecamatan Curug	Meningkatkan Sdm Yang Berdaya Saing	1 PAKET	
CUKANGGALIH					
24	Rehab Puskesmas Pembantu Rt 07/09	Desa Cukanggalih	Memenuhi Kebutuhan Masyarakat Atas Fasilitas Kesehatan	1 PAKET	
25	Drainase Jl Raya Utama Cukanggalih	Desa Cukanggalih	Mencegah Terjadinya Banjir	1M X 3.000 M	
26	Pengadaan Lahan Untuk Pelebaran Jalan Raya Cukanggalih Rw. 1	Desa Cukanggalih	Memfasilitasi Akses Warga	2m x 3.000 M	

NO	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator / Sasaran Kegiatan	Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
27	Drainase Dari Asem Sampai Kali Cirarab Rw. 7 Rw 8	Desa Cukanggalih	Mencegah Terjadinya Banjir	1M X 500 M	
28	Pembangunan Sdn Cukanggalih 3 Rt. 03/05	Desa Cukanggalih	Meningkatkan Sdm Yang Berdaya Saing	1 PAKET	
29	Lanjutan Rehab Gsg Dan Halaman Belakang Kantor Kecamatan Curug	Kecamatan Curug	Memfasilitasi Kegiatan Masyarakat	1 PAKET	
30	Pelatihan Softskill Digital Umkm	Kecamatan Curug	Memaksimalkan Potensi Umkm	1 PAKET	
31	Lanjutan Penataan Akses Stadion Mini	Kecamatan Curug	Memudahkan Akses Ke Stadion Mini	5M X 500 M	
32	Bedah Rumah Rtlh	Kecamatan Curug	Penuntasan Kemiskinan	30 KPM	
33	Penguatan Produk Unggulan Desa/Kelurahan Dalam Menunjang Perekonomian Masyarakat	Kecamatan Curug	Memaksimalkan Potensi Ekonomi	1 PAKET	
CURUG WETAN					
34	Pengadaan Lahan Smpn Curug Wetan Rt. 04/01	Curug Wetan	Meningkatkan Sdm Yang Berdaya Saing	3000 M	
35	Turab Rt 02 Rw 05	Curug Wetan	Mencegah Terjadinya Banjir	100m x 60 x 1.5m	
36	Turab Kp Nagrog,Rt 002/09	Kp Nagrog,Rt 002/09	Mencegah Terjadinya Banjir	200m x 60 x 1.5m	
37	U Ditch Rt 04 Rw 01	Rt 04 Rw 01	Mencegah Terjadinya Banjir	50M X 30CM X 50CM	
38	Pelatihan Pengelolaan Dan Marketing Umkm Rw. 01	Curug Wetan	Meningkatkan Perekonomian Masyarakat	15 UMKM	
39	Pembangunan Jambanisasi (Odf) 200 Kpm	Kecamatan Curug	Mencapai Odf	200 KPM	
KADU					
40	Paving Block Lingkungan Tpu Desa Kadu	Kp. Cijengir Rt 003/007 Desa Kadu	Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas	1.5 m x 200 m ; 2 m x 100 m	
41	Betonisasi Jalan Pokpan Rt. 01, 02, 03 Rw. 07	Desa Kadu	Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas	4 m x 500 m	

NO	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator / Sasaran Kegiatan	Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
42	Turab Tpt Makam Sempur	Kp. Sempur Rt 001/006 Desa Kadu	Memfasilitasi Kebutuhan Masyarakat Atas Pemakaman	1.8 m x 0,4 m x 150 m	
43	Lanjutan Perbaikan Drainase Jl. Bitung - Pasirandu Kp. Kadu Rw 002	Kp. Kadu Rw 002	Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas	1.2 m x 100 m	
44	Lanjutan Uditc Jl. Utama Sempur Kp. Sempur Rw 006	Kp. Sempur Rw 006	Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas	0.4 m x 150 m	
KADUJAYA					
45	Hotmix Jalan Rt. 003 Rw. 005 Desa Kadu Jaya	Sdn Kadu Iv	Memfasilitasi Kegiatan Masyarakat	2.5 m x 200 m	
46	Paving Block Halaman Sdn Kadu Jaya	Kadu Jaya	Mendukung Aktivitas Belajar Mengajar	500 m	
47	Drainase U-Ditch Rt. 03 / 05	Kadu Jaya	Mencegah Terjadinya Banjir	60 cm x 300 m	
48	Lanjutan Betonisasi Jalan Desa Kadu Jaya	Kp. Cisereh Rt. 01/06	Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas	3 x 200 m	
49	Betonisasi Jalan Desa Kadu Jaya	Kp. Bitung 01/05	Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas	3m x 250m	
50	Penataan Kampung Santri	Kecamatan Curug	Memaksimalkan Potensi Ekonomi	1 PAKET	

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam rangka mewujudkan konsistensi perencanaan pembangunan dan penganggaran, maka Dokumen Perencanaan disusun mulai dari RPJPD, RPJMD, RKPD dan Renstra Badan Pembangunan Daerah yang harus disinkonisasikan dengan kebijakan nasional melalui , sedangkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah diaktualisasikan melalui Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), dimana terdapat 9 (sembilan) bidang pembangunan sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005–2025, dengan isu-isu strategis pada masing-masing bidang sebagai berikut :

1. Bidang Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama
   a. Pengendalian Jumlah Penduduk;
   b. Reformasi Pembangunan Kesehatan:
      1) Sistem Jaminan Sosial Nasional (demand and supply);
      2) Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi.
   c. Reformasi Pembangunan Pendidikan;
   d. Sinergi Percepatan.
2. Bidang Ekonomi
   a. Transformasi Sektor Industri Dalam Arti Luas;
   b. Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja;
   c. Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi;
   d. Peningkatan Efisiensi Sistem Logistik dan Distribusi;
   e. Reformasi Keuangan Negara.
3. Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
   a. Peningkatan Kapasitas Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
4. Bidang Sarana dan Prasarana
   a. Peningkatan Ketahanan Air;
   b. Penguatan Konektivitas Nasional:
      1) Keseimbangan Pembangunan Antar Wilayah;
      2) Pendorong Pertumbuhan Ekonomi;
      3) Pembangunan Transportasi Massal Perkotaan.
   c. Peningkatan Ketersediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar:
      1) Peningkatan Rasio Elektrifikasi Nasional;
      2) Peningkatan Akses Air Minum dan Sanitasi;
      3) Penataan Perumahan/Permukiman.
5. Bidang Politik
   a. Konsolidasi Demokrasi.
6. Bidang Pertahanan dan Keamanan
   3.2 Percepatan Pembangunan MEF dan Almatsus POLRI
   3.3 Pemberdayaan Industri Pertahanan
   3.4 Peningkatan Ketertiban dan Keamanan Dalam Negeri.
7. Bidang Hukum dan Aparatur
   a. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Publik;
   b. Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.
8. Bidang Wilayah dan Tata Ruang
   a. Pembangunan Daerah Tertinggal dan Perbatasan;
   b. Pengelolaan Risiko Bencana;
   c. Sinergi Pembangunan Perdesaan.

9. Bidang Sumberdaya Alam dan Lingkungan
    a. Perkuatan Ketahanan Pangan;
    b. Peningkatan Ketahanan Energi;
    c. Percepatan Pembangunan Kelautan;
    d. Peningkatan Perekonomian dan Keanekaragaman Hayati dan Kualitaslingkungan hidup

Sedangkan untuk RPJMN sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2025, dengan agenda pembangunan nasional sebagai penjabaran operasional yaitu :

1. Pembangunan sumber daya manusia (SDM) sebagai prioritas utama;
2. Pemerintah akan terus melanjutkan pembangunan infrastruktur;
3. Segala bentuk kendala regulasi disederhanakan, dan dipangkas;
4. Penyederhaan Birokrasi akan terus dilakukan besar-besaran;
5. Transformasi Ekonomi.

Untuk itu, Pemerintah Kabuaten Tangerang harus mendukung tercapainya bidang-bidang pembangunan nasional tersebut sesuai dengan potensi dan kondisi daerah, mengingat keberhasilan pencapaian bidang bidang pembangunan nasional dimaksud sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah Provinsi dan pemerintah Pusat yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sinkronisasi kebijakan tersebut lebih lanjut dituangkan dalam rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara pemerintah daerah dan DPRD sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD. KUA dan PPAS berpedoman pada RKPD yang telah disinkronisasikan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan SKPD Tahun 2025 yang akan diimplementasikan ke dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) Kabupaten Tangerang Tahun 2025 Sesuai dengan kerangka pemikiran tersebut di atas, maka Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Curug Tahun 2025 hakekatnya merupakan Dokumen Perencanaan yang memberikan arah perencanaan pembangunan secara menyeluruh dan terpadu. Dalam proses penyusunan Renja juga harus memperhatikan kebijakan- kebijakan yang dilaksanakan baik oleh pemerintah pusat maupun provinsi.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Dalam rangka mewujudkan Misi Kabupaten Tangerang, maka perlu dijabarkan kembali ke dalam tujuan dan sasaran strategis yang lebih operasional yang dituangkan dalam Renja Perubahan Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang Tahun 2025, yaitu:

1. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Penetapan Tujuan dalam Rencana Kerja didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama pada Kecamatan Curug.

Adapun rumusan tujuan di dalam Rencana Kerja Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang Tahun 2025 adalah :

1.1 Meningkatkan kualitas pelayanan publik kecamatan

2. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/ dihasilkan secara nyata oleh Kecamatan Curug dalam jangka waktu Satu tahun mendatang. Sesuai dengan tujuan yang telah diuraikan di atas, maka sasaran capaian target yang akan dituangkan ke dalam rencana kerja Kecamatan Curug Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

2.1 Terpenuhinya pelayanan publik sesuai dengan standar kecamatan

2.2 Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja

Tujuan, sasaran dan indikator kinerja sasaran Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang adalah sebagai berikut:

Tabel 5
Tujuan, sasaran dan indikator kinerja sasaran Kecamatan Curug

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Definisi Operasional
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Meningkatkan kualitas pelayanan publik kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat
		Terpenuhinya pelayanan publik sesuai dengan standar kecamatan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat
		Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja	Nilai AKIP	Nilai AKIP

Penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Curug adalah sebagai berikut :

Tabel 6
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Curug

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal Kinerja		Target			Kondisi Akhir
			2022*	2023**	2024	2025	2026	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Angka	81,14	82	83	84	85	85
2	Nilai AKIP	Angka	78,81	80	80,5	81	82	82

2.1 Progam dan Kegiatan

Sebagai perwujudan dalam mendukung prioritas pembangunan Kabupaten Tangerang Tahun 2025, prioritas pembangunan daerah yang terkait dengan kegiatan operasional Kecamatan Curug adalah Peningkatan kualitas perencanaan melalui peningkatan profesionalisme aparatur Kecamatan Curug dalam pembangunan dan peningkatan kualitas dokumen perencanaan yang dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024 dan Tahun 2025 sampai dengan triwulan II yang sudah berjalan, pelaksanaan kinerja Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang Tahun

2025 ditunjang dengan Belanja Tidak Langsung yang anggarannya diperuntukan untuk Belanja Pegawai dan Belanja Langsung yang terdiri dari Belanja Langsung Urusan SKPD dan Belanja Langsung Urusan Wajib dan Pilihan (Program), dengan ruang lingkup kegiatannya.

Rancangan Rencana kerja perubahan untuk tahun 2025, program dan kegiatan yang ada di Perangkat Daerah Kantor Kecamatan Curug pada dasarnya mengacu pada Permendagri No 90 tahun 2019 dan penambahan disesuaikan dengan tuntuntan perkembangan jaman, hal ini disebabkan program yang dilaksanakan telah sesuai dengan rencana kerja yang disusun dalam Dukumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Adapun penjelasan program dan kegiatan untuk Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut :

1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan adalah :
   a. Program dan Kegiatan Rutin setiap tahun
   b. Program dan Kegiatan yang bersifat mendesak untuk dilaksanakan khususnya untuk peningkatan pelayanan masyarakat.
   c. Program dan Kegiatan dibidang pembangunan infrastruktur, perekonomian masyarakat, penanganan kemiskinan ekstream dan stunting, peningkatan SDM dan kualitas tata Kelola pemerintahan.
2. Uraian garis besar rekapitulasi program dan kegiatan untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah dalam Tahun 2025 sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
   b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
   c. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD

1.3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
   a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
   b. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

1.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah
   a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
   b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
   d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
   e. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   f. Fasilitasi Kunjungan Tamu
   g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

1.5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
   b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

1.6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
   b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
   c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
   d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

2.1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
   a. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

2.2 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
   a. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum

3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

3.1 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
   a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
   b. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

3.2 Kegiatan Pemberdayaan (Kelurahan Sukabakti, Binong dan Curug Kulon)
   a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
   b. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
   c. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

4.1 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
   a. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perndang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

5. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

5.1 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan

Pengawasan Pemerintahan Desa

a.Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa

6. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

6.1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

a. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
b. Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
c. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

3.3 Rencana Perubahan Program dan Kegiatan Kecamatan Curug

Berdasarkan Evaluasi Rencana Kerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 Kecamatan Curug terdapat penambahan/pengurangan pagu indikatif sub kegiatan. Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Curug adalah sebagai berikut :

Tabel 7. Pendanaan Program dan Kegiatan Perubahan Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2025				Bertambah /Berkurang	Alasan Perubahan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif					
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		KECAMATAN CURUG					**36.524.785.261,00**	**36.007.430.139,00**	**-517.355.122,00**			**26.874.945.880,00**
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**					**36.524.785.261,00**	**36.007.430.139,00**	**-517.355.122,00**			**26.874.945.880,00**
	7.01	**KECAMATAN**					**29.435.065.261,00**	**29.199.414.439,00**	**-235.650.822,00**			**17.695.933.240,00**
1,	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA**	**Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan**		**100 Persen**	**100 Persen**	**14.489.463.661,00**	**14.517.321.039,00**	**27.857.378,00**		**100 %**	**12.786.273.240,00**
	7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	***Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***		**7 Dokumen**	**7 Dokumen**	**141.028.000,00**	**140.028.000,00**	**-1.000.000,00**		**6**	**180.030.000,00**
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	Kab. Tangerang, Curug, Semua Kel/ Desa	4 Dokumen	3 Dokumen	71.022.000,00	70.522.000,00	-500.000,00	Refocusing Honor Tim Pelaksana	4	101.490.000,00
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan*	Kab. Tangerang, Curug, Semua Kel/ Desa	2 Laporan	2 Laporan	31.122.000,00	31.122.000,00	0,00		2	37.740.000,00

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2025				Bertambah /Berkurang	Alasan Perubahan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	Kab. Tangerang, Curug, Semua Kel/ Desa	1 Laporan	1 Laporan	38.884.000,00	38.384.000,00	-500.000,00	Refocusing Honor Tim Pelaksana	1	40.800.000,00
	7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	***Jumlah laporan keuangan***		**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**10.367.131.213,00**	**10.304.036.291,00**	**-63.094.922,00**		**1**	**9.323.553.780,00**
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	Kab. Tangerang, Curug, Semua Kel/ Desa	41 Orang/bulan	37 Orang/bulan	10.337.876.213,00	10.275.281.291,00	-62.594.922,00	Penyesuaian Gaji dan Tunjangan	41	9.292.953.780,00
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD*	Kab. Tangerang, Curug, Semua Kel/ Desa	2 Laporan	1 Laporan	29.255.000,00	28.755.000,00	-500.000,00	Refocusing Honor Tim Pelaksana	2	30.600.000,00
	7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	***Jumlah pegawai yang difasilitas***		**41 orang**	**41 orang**	**191.420.000,00**	**169.562.000,00**	**-21.858.000,00**		**43**	**160.140.000,00**
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*	Kab. Tangerang, Curug, Semua Kel/ Desa	41 Paket	41 Paket	84.878.000,00	84.878.000,00	0,00		43	54.060.000,00
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*	Kab. Tangerang, Curug, Semua Kel/ Desa	100 Orang	85 Orang	106.542.000,00	84.684.000,00	-21.858.000,00	Refocusing Anggaran	43	106.080.000,00
	7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	***Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah***		**8 jenis**	**8 jenis**	**1.394.132.100,00**	**1.420.842.400,00**	**26.710.300,00**		**9**	**1.303.356.000,00**
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	Kab. Tangerang, Curug, Semua Kel/ Desa	4 Paket	4 Paket	23.425.500,00	23.425.500,00	0,00		4	41.310.000,00
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	Kab. Tangerang, Curug, Semua Kel/ Desa	12 Paket	15 Paket	786.468.800,00	961.468.800,00	175.000.000,00	Penambahan Anggaran untuk Pembelian Germo	10	663.000.000,00
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga*	Kab. Tangerang, Curu	12 Paket	12 Paket	50.833.000,00	50.833.000,00	0,00		16	125.562.000,00

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2025				Bertambah /Berkurang	Alasan Perubahan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			yang Disediakan	g, Semua Kel/ Desa								
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	Kab. Tangerang, Curug, Semua Kel/ Desa	48 Paket	49 Paket	104.426.800,00	105.222.100,00	795.300,00	Kelebihan atas Refocusing	51	101.184.000,00
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	Kab. Tangerang, Curug, Semua Kel/ Desa	4 Paket	3 Paket	137.276.000,00	101.560.000,00	-35.716.000,00	Refocusing Anggaran	5	96.900.000,00
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	Kab. Tangerang, Curug, Semua Kel/ Desa	12 Laporan	11 Laporan	130.956.000,00	97.960.000,00	-32.996.000,00	Refocusing Anggaran	13	142.800.000,00
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	Kab. Tangerang, Curug, Semua Kel/ Desa	4 Laporan	3 Laporan	160.746.000,00	80.373.000,00	-80.373.000,00	Refocusing Anggaran	3	132.600.000,00
	7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	***Tersedianya Jasa Penunjang***		**4 jenis**	**4 jenis**	**1.172.675.269,00**	**1.259.775.269,00**	**87.100.000,00**		**4**	**999.113.460,00**
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	Kab. Tangerang, Curug, Semua Kel/ Desa	12 Laporan	12 Laporan	11.771.400,00	11.771.400,00	0,00		17	16.576.020,00
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	Kab. Tangerang, Curug, Semua Kel/ Desa	5 Laporan	5 Laporan	136.738.301,00	136.738.301,00	0,00		6	128.520.000,00
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	Kab. Tangerang, Curug, Semua Kel/ Desa	12 Laporan	14 Laporan	1.024.165.568,00	1.111.265.568,00	87.100.000,00	Penambahan THR dan Gaji 13 Non PNS	6	854.017.440,00
	7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	***Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***		**4 jenis**	**4 jenis**	**1.223.077.079,00**	**1.223.077.079,00**	**0,00**		**5**	**820.080.000,00**
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*	Kab. Tangerang, Curug, Semua Kel/ Desa	1 Unit	1 Unit	54.181.192,00	54.181.192,00	0,00		6	39.780.000,00

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2025				Bertambah /Berkurang	Alasan Perubahan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif					
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Dinas Jabatan										
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	Kab. Tangerang, Curug, Semua Kel/ Desa	3 Unit	3 Unit	312.229.548,00	312.229.548,00	0,00		5	243.270.000,00
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	Kab. Tangerang, Curug, Semua Kel/ Desa	28 Unit	28 Unit	32.700.000,00	32.700.000,00	0,00		10	27.030.000,00
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	Kab. Tangerang, Curug, Semua Kel/ Desa	3 Unit	3 Unit	823.966.339,00	823.966.339,00	0,00		5	510.000.000,00
2,	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar Kecamatan Curug Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik Kecamatan Curug**		**8498,30 Persen Persen**	**8498,30 Persen Persen**	**12.669.408.700,00**	**12.706.168.700,00**	**36.760.000,00**		**85% 98,5 %**	**2.713.600.000,00**
	7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	***Tersedianya pemenuhan sarana dan prasarana Paten di Kecamatan***		**1 Unit**	**1 Unit**	**13.332.000,00**	**13.332.000,00**	**0,00**		**1**	**183.600.000,00**
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	Kab. Tangerang, Curug, Semua Kel/ Desa	1 Laporan	1 Laporan	13.332.000,00	13.332.000,00	0,00		1	183.600.000,00
	7.01.02.2.03	**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**	***Jumlah infrastruktur yang dipelihara***		**35 Titik**	**35 Titik**	**12.656.076.700,00**	**12.692.836.700,00**	**36.760.000,00**		**40**	**2.530.000.000,00**
	7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	*Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum*	Kab. Tangerang, Curug, Semua Kel/ Desa	35 Dokumen	40 Dokumen	12.656.076.700,00	12.692.836.700,00	36.760.000,00	Penambahan Anggaran	55	2.530.000.000,00

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2025				Bertambah /Berkurang	Alasan Perubahan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif					
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3,	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaa Kec. Curug**		**80 Persen**	**80 Persen**	**1.507.116.000,00**	**1.423.867.800,00**	**-83.248.200,00**		**80,50%**	**1.320.900.000,00**
	7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	***Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan/pemberdayaan***		**25 kelompok**	**25 kelompok**	**1.507.116.000,00**	**1.423.867.800,00**	**-83.248.200,00**		**30**	**1.320.900.000,00**
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa*	Kab. Tangerang, Curug, Semua Kel/ Desa	6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	96.278.000,00	96.278.000,00	0,00		8	96.900.000,00
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	Kab. Tangerang, Curug, Semua Kel/ Desa	12 Laporan	11 Laporan	1.410.838.000,00	1.327.589.800,00	-83.248.200,00	Refocusing Anggaran	10	1.224.000.000,00
4,	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti**		**73 Persen**	**73 Persen**	**198.327.000,00**	**108.837.000,00**	**-89.490.000,00**		**75%**	**173.400.000,00**
	7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	***Jumlah kegiatan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan***		**12 Kali**	**12 Kali**	**198.327.000,00**	**108.837.000,00**	**-89.490.000,00**		**9**	**173.400.000,00**
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan*	Kab. Tangerang, Curug, Semua Kel/ Desa	12 Laporan	11 Laporan	198.327.000,00	108.837.000,00	-89.490.000,00	Refocusing Anggaran	9	173.400.000,00
5,	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti**		**81 Persen**	**81 Persen**	**401.659.900,00**	**350.521.500,00**	**-51.138.400,00**		**83%**	**516.120.000,00**
	7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	***Jumlah Orang yang mengikuti pembinaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah***		**3 jenis**	**3 jenis**	**401.659.900,00**	**350.521.500,00**	**-51.138.400,00**		**5**	**516.120.000,00**
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan*	Kab. Tangerang, Curug, Semua Kel/ Desa	50 Orang	45 Orang	269.869.900,00	247.571.500,00	-22.298.400,00	Refocusing Anggaran	60	265.200.000,00

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2025				Bertambah /Berkurang	Alasan Perubahan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif					
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	*Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia*									
	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa*	Kab. Tangerang, Curug, Semua Kel/ Desa	50 Orang	45 Orang	18.030.000,00	15.110.000,00	-2.920.000,00	Refocusing Anggaran	60	41.820.000,00
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	*Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan*	Kab. Tangerang, Curug, Semua Kel/ Desa	12 Dokumen	11 Dokumen	113.760.000,00	87.840.000,00	-25.920.000,00	Refocusing Anggaran	60	209.100.000,00
6,	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Presentase Desa Dengan Laporan Administrasi baik**		**89,30 Persen**	**89,30 Persen**	**169.090.000,00**	**92.698.400,00**	**-76.391.600,00**		**89,45%**	**185.640.000,00**
	7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	***Jumlah Desa yang difasilitasi***		**4 desa**	**4 desa**	**169.090.000,00**	**92.698.400,00**	**-76.391.600,00**		**4**	**185.640.000,00**
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	*Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa*	Kab. Tangerang, Curug, Semua Kel/ Desa	4 Dokumen	3 Dokumen	169.090.000,00	92.698.400,00	-76.391.600,00	Refocusing Anggaran	7	185.640.000,00
		KELURAHAN SUKABAKTI					**2.292.954.000,00**	**2.222.724.950,00**	**-70.229.050,00**			**2.909.285.400,00**
1,	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA**	**Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan**		**100 Persen**	**100 Persen**	**879.140.500,00**	**903.246.450,00**	**24.105.950,00**		**100 %**	**977.185.400,00**
	7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	***Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah***		**8 jenis**	**8 jenis**	**285.400.000,00**	**269.905.950,00**	**-15.494.050,00**		**9**	**311.773.000,00**
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	Kab. Tangerang, Curug, Sukabakti	4 Paket	4 Paket	12.638.400,00	12.638.400,00	0,00		4	13.260.000,00
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	Kab. Tangerang, Curug, Sukabakti	14 Paket	14 Paket	149.797.500,00	149.797.500,00	0,00		10	178.500.000,00

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2025				Bertambah /Berkurang	Alasan Perubahan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif					
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*	Kab. Tangerang, Curug, Sukabakti	10 Paket	10 Paket	16.857.100,00	16.857.100,00	0,00		16	22.950.000,00
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	Kab. Tangerang, Curug, Sukabakti	25 Paket	65 Paket	42.200.800,00	43.325.550,00	1.124.750,00	Kelebihan atas Refocusing	51	37.740.000,00
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	Kab. Tangerang, Curug, Semua Kel/ Desa	5 Paket	4 Paket	26.891.200,00	20.172.400,00	-6.718.800,00	Refocusing Anggaran	5	20.400.000,00
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	Kab. Tangerang, Curug, Sukabakti	12 Laporan	12 Laporan	17.215.000,00	17.215.000,00	0,00		13	25.000.000,00
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	Kab. Tangerang, Curug, Semua Kel/ Desa	3 Laporan	2 Laporan	19.800.000,00	9.900.000,00	-9.900.000,00	Refocusing Anggaran	3	13.923.000,00
	7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	***Tersedianya Jasa Penunjang***		**4 jenis**	**4 jenis**	**506.246.800,00**	**545.846.800,00**	**39.600.000,00**		**4**	**500.172.400,00**
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	Kab. Tangerang, Curug, Sukabakti	12 Laporan	12 Laporan	2.236.000,00	2.236.000,00	0,00		17	17.890.800,00
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	Kab. Tangerang, Curug, Sukabakti	12 Laporan	12 Laporan	96.094.800,00	96.094.800,00	0,00		6	115.000.000,00
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	Kab. Tangerang, Curug, Sukabakti	12 Laporan	14 Laporan	407.916.000,00	447.516.000,00	39.600.000,00	Penambahan THR dan Gaji 13 Non PNS	6	367.281.600,00
	7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	***Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***		**5 jenis**	**5 jenis**	**87.493.700,00**	**87.493.700,00**	**0,00**		**5**	**165.240.000,00**
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	Kab. Tangerang, Curug, Sukabakti	16 Unit	16 Unit	28.200.000,00	28.200.000,00	0,00		10	27.540.000,00
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	Kab. Tangerang, Curug, Sukabakti	1 Unit	1 Unit	59.293.700,00	59.293.700,00	0,00		1	137.700.000,00

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2025				Bertambah /Berkurang	Alasan Perubahan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif					
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2,	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar Kecamatan Curug Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik Kecamatan Curug**		**8498,30 Persen Persen**	**8498,30 Persen Persen**	**594.890.000,00**	**583.790.000,00**	**-11.100.000,00**		**85% 98,5 %**	**550.000.000,00**
	7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	***Tersedianya pemenuhan sarana dan prasarana Paten di Kecamatan***		**6 unit**	**6 unit**	**594.890.000,00**	**583.790.000,00**	**-11.100.000,00**		**6**	**550.000.000,00**
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	Kab. Tangerang, Curug, Sukabakti	4 Laporan	3 Laporan	594.890.000,00	583.790.000,00	-11.100.000,00	Refocusing Anggaran	4	550.000.000,00
3,	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaa Kec. Curug**		**80 Persen**	**80 Persen**	**743.573.500,00**	**677.368.500,00**	**-66.205.000,00**		**80,50%**	**1.297.440.000,00**
	7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	***Jumlah sarana dan prasarana Kelurahan yang dibangun***		**55 titik**	**55 titik**	**743.573.500,00**	**677.368.500,00**	**-66.205.000,00**		**60**	**1.297.440.000,00**
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan*	Kab. Tangerang, Curug, Sukabakti	3 Lembaga Kemasyarakatan	3 Lembaga Kemasyarakatan	9.760.000,00	9.760.000,00	0,00		9	22.440.000,00
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*	Kab. Tangerang, Curug, Sukabakti	25 Unit	25 Unit	164.578.500,00	164.578.500,00	0,00		81	510.000.000,00
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*	Kab. Tangerang, Curug, Sukabakti	3 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	569.235.000,00	503.030.000,00	-66.205.000,00	Refocusing Anggaran	15	765.000.000,00
4,	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti**		**73 Persen**	**73 Persen**	**75.350.000,00**	**58.320.000,00**	**-17.030.000,00**		**75%**	**84.660.000,00**
	7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	***Jumlah kegiatan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan***		**7 kali**	**7 kali**	**75.350.000,00**	**58.320.000,00**	**-17.030.000,00**		**9**	**84.660.000,00**

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2025				Bertambah /Berkurang	Alasan Perubahan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif					
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan*	Kab. Tangerang, Curug, Sukabakti	5 Laporan	4 Laporan	75.350.000,00	58.320.000,00	-17.030.000,00	Refocusing Anggaran	9	84.660.000,00
		KELURAHAN BINONG					**2.675.184.000,00**	**2.584.949.000,00**	**-90.235.000,00**			**3.503.780.240,00**
1,	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA**	**Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan**		**100 Persen**	**100 Persen**	**753.569.400,00**	**775.659.400,00**	**22.090.000,00**		**100 %**	**1.030.280.240,00**
	7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	***Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah***		**8 jenis**	**8 jenis**	**210.786.700,00**	**196.876.700,00**	**-13.910.000,00**		**9**	**359.121.600,00**
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	Kab. Tangerang, Curug, Binong	4 Paket	4 Paket	5.523.000,00	5.523.000,00	0,00		4	9.486.000,00
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	Kab. Tangerang, Curug, Binong	12 Paket	12 Paket	92.417.700,00	92.417.700,00	0,00		10	193.800.000,00
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*	Kab. Tangerang, Curug, Binong	10 Paket	10 Paket	6.612.500,00	6.612.500,00	0,00		16	19.380.000,00
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	Kab. Tangerang, Curug, Binong	30 Paket	31 Paket	41.693.500,00	42.063.500,00	370.000,00	Kelebihan atas Refocusing	51	58.140.000,00
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	Kab. Tangerang, Curug, Binong	5 Paket	5 Paket	10.750.000,00	10.750.000,00	0,00		5	32.130.000,00
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	Kab. Tangerang, Curug, Binong	12 Laporan	11 Laporan	33.990.000,00	29.610.000,00	-4.380.000,00	Refocusing Anggaran	13	27.030.000,00
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	Kab. Tangerang, Curug, Binong	3 Laporan	2 Laporan	19.800.000,00	9.900.000,00	-9.900.000,00	Refocusing Anggaran	3	19.155.600,00
	7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	***Tersedianya Jasa Penunjang***		**4 jenis**	**4 jenis**	**446.177.000,00**	**482.177.000,00**	**36.000.000,00**		**4**	**438.977.640,00**
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	Kab. Tangerang, Curug,	12 Laporan	12 Laporan	2.795.000,00	2.795.000,00	0,00		17	21.000.000,00

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2025				Bertambah /Berkurang	Alasan Perubahan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif					
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Binong								
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	Kab. Tangerang, Curug, Binong	12 Laporan	12 Laporan	83.952.000,00	83.952.000,00	0,00		6	91.139.040,00
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	Kab. Tangerang, Curug, Binong	12 Laporan	14 Laporan	359.430.000,00	395.430.000,00	36.000.000,00	Penambahan THR dan Gaji 13 Non PNS	6	326.838.600,00
	7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	***Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***		**5 jenis**	**5 jenis**	**96.605.700,00**	**96.605.700,00**	**0,00**		**5**	**232.181.000,00**
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	Kab. Tangerang, Curug, Binong	30 Unit	30 Unit	37.350.000,00	37.350.000,00	0,00		10	32.181.000,00
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	Kab. Tangerang, Curug, Binong	1 Unit	1 Unit	59.255.700,00	59.255.700,00	0,00		1	200.000.000,00
2,	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar Kecamatan Curug Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik Kecamatan Curug**		**8498,30 Persen Persen**	**8498,30 Persen Persen**	**1.232.006.000,00**	**1.220.586.000,00**	**-11.420.000,00**		**85% 98,5%**	**918.000.000,00**
	7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	***Tersedianya pemenuhan sarana dan prasarana Paten di Kecamatan***		**6 unit**	**6 unit**	**1.232.006.000,00**	**1.220.586.000,00**	**-11.420.000,00**		**6**	**918.000.000,00**
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	Kab. Tangerang, Curug, Binong	3 Laporan	2 Laporan	1.232.006.000,00	1.220.586.000,00	-11.420.000,00	Refocusing Anggaran	3	918.000.000,00
3,	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaa Kec. Curug**		**80 Persen**	**80 Persen**	**628.233.600,00**	**553.439.600,00**	**-74.794.000,00**		**80,50%**	**1.417.800.000,00**
	7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	***Jumlah sarana dan prasarana Kelurahan yang dibangun***		**55 titik**	**55 titik**	**628.233.600,00**	**553.439.600,00**	**-74.794.000,00**		**55**	**1.417.800.000,00**

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2025				Bertambah /Berkurang	Alasan Perubahan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif					
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan*	Kab. Tangerang, Curug, Binong	3 Lembaga Kemasyarakatan	3 Lembaga Kemasyarakatan	13.650.000,00	13.650.000,00	0,00		9	20.400.000,00
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*	Kab. Tangerang, Curug, Binong	25 Unit	25 Unit	0,00	0,00	0,00		81	510.000.000,00
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*	Kab. Tangerang, Curug, Binong	3 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	614.583.600,00	539.789.600,00	-74.794.000,00	Refocusing Anggaran	15	887.400.000,00
4,	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti**		**73 Persen**	**73 Persen**	**61.375.000,00**	**35.264.000,00**	**-26.111.000,00**		**75,00%**	**137.700.000,00**
	7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	***Jumlah kegiatan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan***		**7 Kali**	**7 Kali**	**61.375.000,00**	**35.264.000,00**	**-26.111.000,00**		**9**	**137.700.000,00**
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan*	Kab. Tangerang, Curug, Binong	5 Laporan	4 Laporan	61.375.000,00	35.264.000,00	-26.111.000,00	Refocusing Anggaran	9	137.700.000,00
		KELURAHAN CURUG KULON					**2.121.582.000,00**	**2.000.341.750,00**	**-121.240.250,00**			**2.765.947.000,00**
1,	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA**	**Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan**		**100 Persen**	**100 Persen**	**675.731.400,00**	**695.707.150,00**	**19.975.750,00**		**100,00%**	**953.930.000,00**
	7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	***Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah***		**8 jenis**	**8 jenis**	**137.492.800,00**	**121.468.550,00**	**-16.024.250,00**		**9**	**383.130.000,00**
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	Kab. Tangerang, Curug, Curug Kulon	5 Paket	5 Paket	4.356.600,00	4.356.600,00	0,00		4	10.000.000,00
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	Kab. Tangerang, Curug, Curug Kulon	6 Paket	6 Paket	21.792.000,00	21.792.000,00	0,00		10	224.400.000,00
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*	Kab. Tangerang, Curug, Curu	10 Paket	10 Paket	11.043.000,00	11.043.000,00	0,00		16	25.500.000,00

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2025				Bertambah /Berkurang	Alasan Perubahan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif					
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				g Kulon								
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	Kab. Tangerang, Curug, Curug Kulon	12 Paket	13 Paket	22.106.200,00	27.214.950,00	5.108.750,00	Kelebihan atas Refocusing	51	28.050.000,00
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	Kab. Tangerang, Curug, Curug Kulon	10 Paket	9 Paket	20.666.000,00	11.972.000,00	-8.694.000,00	Refocusing Anggaran	5	25.500.000,00
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	Kab. Tangerang, Curug, Curug Kulon	12 Laporan	12 Laporan	33.474.000,00	33.474.000,00	0,00		13	34.680.000,00
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	Kab. Tangerang, Curug, Curug Kulon	3 Laporan	2 Laporan	24.055.000,00	11.616.000,00	-12.439.000,00	Refocusing Anggaran	3	35.000.000,00
	7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	***Tersedianya Jasa Penunjang***		**4 jenis**	**4 jenis**	**431.458.000,00**	**467.458.000,00**	**36.000.000,00**		**4**	**440.800.000,00**
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	Kab. Tangerang, Curug, Curug Kulon	12 Laporan	12 Laporan	8.648.000,00	8.648.000,00	0,00		17	20.000.000,00
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	Kab. Tangerang, Curug, Curug Kulon	12 Laporan	12 Laporan	39.380.000,00	39.380.000,00	0,00		6	40.800.000,00
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	Kab. Tangerang, Curug, Curug Kulon	12 Laporan	14 Laporan	383.430.000,00	419.430.000,00	36.000.000,00	Penambahan THR dan Gaji 13 Non PNS	6	380.000.000,00
	7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	***Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***		**5 jenis**	**5 jenis**	**106.780.600,00**	**106.780.600,00**	**0,00**		**5**	**130.000.000,00**
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	Kab. Tangerang, Curug, Curug Kulon	27 Unit	27 Unit	26.150.000,00	26.150.000,00	0,00		10	30.000.000,00
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	Kab. Tangerang, Curug, Curug Kulon	1 Unit	1 Unit	80.630.600,00	80.630.600,00	0,00		1	100.000.000,00

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2025				Bertambah /Berkurang	Alasan Perubahan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif					
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2,	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar Kecamatan Curug Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik Kecamatan Curug**		**8498,30 Persen Persen**	**8498,30 Persen Persen**	**437.643.500,00**	**415.743.500,00**	**-21.900.000,00**		**85% 98,5%**	**350.000.000,00**
	7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	***Tersedianya pemenuhan sarana dan prasarana Paten di Kecamatan***		**6 unit**	**6 unit**	**437.643.500,00**	**415.743.500,00**	**-21.900.000,00**		**6**	**350.000.000,00**
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	Kab. Tangerang, Curug, Curug Kulon	2 Laporan	1 Laporan	437.643.500,00	415.743.500,00	-21.900.000,00	Refocusing Anggaran	2	350.000.000,00
3,	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaa Kec. Curug**		**80 Persen**	**80 Persen**	**882.267.100,00**	**791.291.100,00**	**-90.976.000,00**		**80,50%**	**1.305.600.000,00**
	7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	***Jumlah sarana dan prasarana Kelurahan yang dibangun***		**55 titik**	**55 titik**	**882.267.100,00**	**791.291.100,00**	**-90.976.000,00**		**55**	**1.305.600.000,00**
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan*	Kab. Tangerang, Curug, Curug Kulon	3 Lembaga Kemasyarakatan	3 Lembaga Kemasyarakatan	10.320.000,00	10.320.000,00	0,00		9	20.400.000,00
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*	Kab. Tangerang, Curug, Curug Kulon	25 Unit	25 Unit	230.682.100,00	230.682.100,00	0,00		81	510.000.000,00
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*	Kab. Tangerang, Curug, Curug Kulon	4 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	641.265.000,00	550.289.000,00	-90.976.000,00	Refocusing Anggaran	15	775.200.000,00
4,	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti**		**73 Persen**	**73 Persen**	**125.940.000,00**	**97.600.000,00**	**-28.340.000,00**		**75,00%**	**156.417.000,00**
	7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan**	***Jumlah kegiatan ketentraman dan***		**7 Kali**	**7 Kali**	**125.940.000,00**	**97.600.000,00**	**-28.340.000,00**		**9**	**156.417.000,00**

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2025				Bertambah /Berkurang	Alasan Perubahan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif					
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Ketenteraman dan Ketertiban Umum	***ketertiban umum di kecamatan***									
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan*	Kab. Tangerang, Curug, Curug Kulon	5 Laporan	4 Laporan	125.940.000,00	97.600.000,00	-28.340.000,00	Refocusing Anggaran	9	156.417.000,00
	JUMLAH						**36.524.785.261,00**	**36.007.430.139,00**	**-517.355.122,00**			**26.874.945.880,00**

BAB IV
PENUTUP

Renja Perubahan Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang Tahun 2025 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Renja Perubahan Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang Tahun 2025 antara lain :

1. Perumusan program dan kegiatan beserta indikatornya pada Renja Perubahan Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tangerang;
2. Penyusunan Renja Perubahan Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang 2025 merupakan pedoman dalam melakukan kegiatan kecamatan pada tahun 2025 setelah dilakukan evaluasi pada tahun berjalan sampai dengan TW II 2025. Namun karena belum berakhirnya seluruh kegiatan di TW II ini maka adanya beberapa kegiatan yang belum dapat terukur sepenuhnya. Selain itu terdapat penyesuaian penambahan dan pengurangan anggaran/kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Kecamatan Curug;
3. Anggaran pada Renja Perubahan Kecamatan Curug hampir secara keseluruhan kegiatan dan sub kegiatan mengalami perubahan dari Renja Murni 2025 dikarenakan adanya penyesuaian kebutuhan pada Kecamatan Curug terutama adanya Refocusing anggaran dari Pemerintah Pusat dan Daerah.
4. Penyusunan Renja Perubahan Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang ini juga berpedoman pada RKPD Perubahan Kabupaten Tangerang Tahun 2025, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Renja Perubahan Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Renja Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang ini akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan yang ada di Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang.

c. Rencana Tindak Lanjut

Rencana Tindak Lanjut dari penyusunan dokumen Renja Perubahan Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang ini adalah melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan serta melaksanakan pengendalian baik untuk realisasi anggaran maupun atas kinerja yang telah ditetapkan. Keberhasilan pelaksanaan Renja Perubahan ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan stakeholder pembangunan di Kabupaten Tangerang.

Demikian dengan tersusunnya Renja Perubahan Kecamatan Curug ini semoga dapat menjadi pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan di Tahun 2024. Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang agar

dapat terwujud konsistensi antara perencanaan penganggaran serta pelaksanaan program dan kegiatan di Kecamatan Curug, dan tersusunnya Renja Perubahan Kecamatan Curug Tahun 2024 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian visi Pemerintah Kabupaten Tangerang.

36. Kecamatan Legok

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, Proses penyusunan Renja OPD terdiri dari tiga tahapan utama yaitu persiapan penyusunan, tahapan penyusunan rancangan, dan tahap penetapan rencana kerja OPD. Penyusunan Renja OPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja OPD yang definitif.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Renja OPD Kecamatan Legok merupakan dokumen perencanaan OPD Kecamatan untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan RKPD Kabupaten Tangerang.

Dokumen Renja Perubahan Kecamatan Legok Tahun 2025 merupakan satu kesatuan dokumen yang tidak terpisahkan dari Keputusan Camat Legok Nomor : 900/Kep. –Kec.Lgk/2025 tentang Rencana Kerja Kecamatan Legok Tahun Anggaran 2025, sehingga dalam melakukan perubahan berpedoman pada peraturan tersebut yang sudah melalui proses tahapan perencanaan sesuai ketentuan yang berlaku.

Rencana Kerja Perubahan (RENJA-P) Kecamatan Legok tahun 2025, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi Kecamatan Kecamatan Legok tahun 2024 – 2026 seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Kecamatan Legok Tahun 2024 – 2026 yaitu :

“Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Tangerang yang Religius, Cerdas, Sehat dan Sejahtera”

Visi tersebut secara eksplisit dapat dijelaskan bahwa :

Religius mengandung bahwa nilai-nilai agama mendasari sikap dan perilaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai dengan prinsip-prinsip keagamaan yang di anut.

Cerdas yang mengandung makna memiliki wawasan, kemampuan, dan keterampilan yang cukup terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pencapaian tingkat pendidikan formal sehingga mendukung kualitas sumber daya masyarakat sebagai subyek pembangunan.

Sehat yang mengandung makna memiliki keadaan sumber daya manusia yang sempurna baik fisik, mental dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

Sejahtera mengandung makna memiliki tingkat kesejahteraan tertentu yang didukung oleh terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan dan papan secara merata serta memiliki daya beli yang memadai sehingga mampu mewujudkan kemandirian didukung kelestarian lingkungan hidup

Misi adalah pernyataan tentang upaya yang harus dilakukan dalam usaha mewujudkan Visi. Misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan Visi Kabupaten Tangerang Tahun 2024 -2026 tersebut akan ditempuh melalui Enam misi pembangunan daerah sebagai berikut :

1. Meningkatkan penerapan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyaraka menuju masyarakat yang religius.
2. Meningkatkan akses, mutu dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas dan sehat.
3. Mengembangkan ekonomi daerah yang kompetitif dan berbasis kerakyatan
4. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan dan akuntabel.
5. Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan Rencana Tata Ruang wilayah
6. Mengembangkan inovasi daerah dalam rangka meningkatkan kualitas daya saing daerah, masyarakat dan pelaku pembangunan lainnya.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Legok Tahun 2025 antara lain :

1. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang mengamanatkan untuk menyusun Kelembagaan baru paling lambat 6 bulan setelah Peraturan Pemerintah
3. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang system perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 125 sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan undang – undang nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas undang – undang 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 108. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang

rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah;

8. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 05 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tangerang Tahun 2013-1018.
10. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelimpahan sebagian urusan Pemerintah kepada Kecamatan.
11. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 113 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, Tugsa dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang.
12. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomot 16 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2025.
13. Keputusan Plt. camat legok Nomor : 900/Kep. –Lgk/2024 Tentang penyusunan rencana kerja perubahan Organisasi Perangkat Daerah (Renja-P OPD)

1.2 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Perubahan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kecamatan Legok Kabupaten Tangerang ini disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam OPD serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

Adapun tujuan disusunya Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Legok Tahun 2024 adalah :

a. Sebagai input dalam rangka perbaikan pelaksanaan tugas dan peningkatan pembangunan satu tahun kedepan;
b. Mewujudkan sinkronisasi dan sinergitas antara Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026, Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Legok Tahun 2024-2026 dengan visi, misi, tujuan, kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Legok Kabupaten Tangerang;
c. Membuat acuan perencanaan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD Kecamatan;
d. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi Antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran;
e. Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat berikutnya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistimatika penyusunan Renja-P OPD Kecamatan Legok Tahun 2025 adalah sebagai berikut ;

1. **BAB I.**
   PENDAHULUAN
   1.1 Latar Belakang
   1.2 Landasan Hukum
   1.3 Maksud dan Tujuan
   1.4 Sistematika Penulisan
2. **BAB II. HASIL EVALUASI RENJA KEC. LEGOK SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025**
   2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja-P Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
   2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
   2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
   2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
   2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
3. **BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**
4. **BAB IV PENUTUP**

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERUBAHAN KEC. LEGOK SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Perangkat Daerah Kecamatan Legok telah mereview terhadap hasil evaluasi pelaksanaan kinerja tahun 2024 dan perkiraan capaian kinerja tahun berjalan (tahun 2025), bahwa dalam mencapai kinerja program dan kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan berdasarkan RPJMD tahun 2024 – 2026. telah dilaksanakan dengan baik.

Adapun review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Legok yang mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan / atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan adalah :

1. Realisasi program / kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan adalah :
   Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan Tahun Anggran 2025 per tanggal 31 Maret 2025, tidak terdapat Program yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang telah direncanakan.
   Hal ini tentunya menjadi sebuah pencapaian yang cukup bagus dalam melaksanakan Program dan kegiatan sehingga mendapatkan hasil sesuai target kinerja yang telah direncanakan.
   Berikut adalah tabel Program dan Kegiatan pada OPD Kecamatan Legok
   yang tidak memenuhi target Kinerja hasil/Keluaran yang direncanakan :

No	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi		Selisih	Keterangan
			Rupiah	Persentase	Rupiah	
1	2	3	4	5	6 = 4-3	
1	**NIHIL..**	**-**	**-**	**-**	**-**	
	✓ Nihil..	-	-	-	-	

2. Realisasi program / kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil /keluaran yang direncanakan adalah :
   Berdasarkan hasil pelaksanaan Program dan kegiatan Tahun Anggran 2025 Kecamatan Legok Telah melaksanakan 5 Program yang didalamnya terdapat 13 kegiatan dan 40 Sub Kegiatan dengan jumlah pagu anggaran sebesar **Rp24.023.336.413** dan serapan anggaran Per 31 Maret 2025 mencapai **19,27**% atau sebesar **Rp19.392.982.705,** adapun program yang berkaitan dengan sasaran renstra Kecamatan Legok telah mencapai hasil yang cukup maksimal, yaitu :
   a. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum
      Pada sasaran Renstra ini terdapat beberapa program yang mendukung tercapainya renstra diantaranya :

a) Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum;

b. Meningkatnya akuntabilitas Perangkat Daerah
Pada sasaran Renstra ini terdapat beberapa program yang mendukung tercapainya renstra diantaranya :
a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

c. Meningkatnya pelayanan masyarakat
Pada sasaran Renstra ini terdapat beberapa program yang mendukung tercapainya renstra diantaranya :
a) Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik;
b) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan.
c) Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Program dan Kegiatan telah memenuhi target sesuai dengan target yang diusulkan baik dalam Dokumen Renstra maupun Renja tahun 2024, sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel T-C.29

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TRIWULAN I TAHUN 2025 KABUPATEN TANGERANG

Nama Perangkat Daerah : KECAMATAN LEGOK

Kode Rekenig					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2025	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0	0
7	01	01	2	01	Keg. Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasikinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	27 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	100%	9 Dokumen	0	0
7	01	01	2	02	Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen adminstrasi keuangan	6 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	0	0
7	01	01	2	05	Keg. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pembinaan Pegawai	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	0	0
7	01	01	2	06	Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	24 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	100%	8 Dokumen	0	0

7	01	01	2	08	Keg. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	0	0
7	01	01	2	07	Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen Jasa Penunjang	9 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	3 Dokumen	0	0
7	01	01	2	09	Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	3 Dokumen	0	0
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pemenuhan PATEN Sesuai Standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0	0
						Persentase Pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara	92%	91.60%	91.75%	91.75%	100%	91,87%	0	0
7	01	02	2	02	Keg. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Pelayanan di Kecamatan Legok	6 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	4 Dokumen	0	0
7	01	02	2	03	Keg. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Laporan Pemeliharan	225 Dokumen	35 Dokumen	78 Dokumen	78 Dokumen	100%	75 Dokumen	0	0
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Masyarakat yang mendapat Pembinaan/Pemberdayaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0	0

7	01	03	2	01	Keg. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Pemberdayaan	33 Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	100%	11 Dokumen	0	0
7	01	03	2	02	Keg. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Laporan Pemberdayaan di Kelurahan	9 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	3 Dokumen	0	0
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Trantibum yang ditindak Lanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0	0
7	01	04	2	01	Keg. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Gangguan Trantibum	24 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	100%	8 Dokumen	0	0
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Prosentase Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0	0
7	01	05	2	01	Keg. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi	6 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	0	0
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Tertib Administrasi Pemerintahan Desa	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0	0
7	01	06	2	01	Keg. Fasilitasi, Rekomendasi Dan Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	49 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	100%	19 Laporan	0	0

3. Realisasi Program/Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah : -
4. Faktor – faktor penyebab tidak tercapaianya terpenuhinya atau melebihi target kinerja Program / Kegiatan adalah : Program / Kegiatan yang melebihi target adalah : -
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah adalah :
   a) Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
   b) Meningkatnya kualitas Sarana Prasaran Aparatur
   c) Terselenggaranya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu
   d) Meningkatnya kapasitas Sumberdaya Aparatur
   e) Terselenggaraanya tata kelola pemerintahan Desa yang baik dan akuntabel.
6. Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor – faktor penyebab tersebut adalah :
   a) Perlu adanya penamabahan Personil di Kecamatan Legok
   b) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
   c) Ketersediaan anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan akan diusulkan melalui PAK tahun berjalan dan apabila tidak terealisasi maka akan diusulkan melalui tahun anggaran berikutnya

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Tangerang Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pendelegasian Kewenangan Dari Bupati Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Daerah, terdapat 2 (dua) urusan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat meliputi Bidang Perizinan dan Non Perizinan. Pelimpahan sebagian urusan yang menjadi wewenang Bupati yang dilimpahkan kepada Camat tersebut dimaksudkan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga tercipta pelayanan masyarakat yang professional, transparan, efektif dan efisien.

Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa jenis pelayanan utama yang ada di Kecamatan Legok, namun secara umum, pelayanan di Kecamatan Legok dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Pelayanan teknis administrasi baik ke dalam maupun keluar;
2. Pelayanan legalisasi surat-surat dan rekomendasi kepada masyarakat;
3. Pelayanan yang bersifat penyediaan data atau informasi kepada Dinas Instansi yang berada di Wilayah Kecamatan maupun Pemerintah Kabupaten Tangerang;
4. Pelayanan kepada Pemerintahan Desa dan Masyarakat terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan pembinaan Sosial Kemasyarakatan.

Selanjutnya, terkait dengan pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Legok Tahun 2024 cukup menggembirakan. Hal ini dapat dinilai dari rasio capaian indikator kinerja Kecamatan Legok yang dapat terealisasi sebesar 100% dari target yang telah ditentukan. Indikator Kinerja Utama yang ditentukan untuk mengukur kinerja Kecamatan Legok Tahun 2024-2026 sesuai dengan Rencana Strategis yaitu terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja Utama berikut ini:

1. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan Legok;
2. Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat/Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbang.

Tabel T-C. 30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Kecamatan Legok Kabupaten Tangerang

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas & Fungsi Perangkat Daerah	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
1	**Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)**		Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah									
	1. Jumlah Capaian Layanan Publik			7.750 Pelayanan	8.000 Pelayanan	8.250 Pelayanan	8.500 Pelayanan	8.500 Pelayanan	8.500 Pelayanan	-	-	APBD
	2. Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat			Nilai IKM 91.75	Nilai IKM 91.87	Nilai IKM 91.94	Nilai IKM 92.00	Nilai IKM 90	Nilai IKM 90,5	-	-	APBD

Pelayanan Kecamatan Legok Kinerja Pelayanan di Kecamatan Legok dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja :

1. Tersedianya Pemenuhan Sarana dan prasarana Paten di Kecamatan
2. Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar
3. Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik
4. Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan/ pemberdayaan
5. Jumlah organisasi pemuda yang dibina
6. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintahan desa

Meningkatnya Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Lingkup analisis kinerja pelayanan di Kecamatan Legok meliputi analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal yang dapat menghasilkan kesimpulan analisis berupa daftar prioritas faktor lingkungan, baik internal maupun eksternal, serta dampaknya terhadap masa depan organisasi, yang selanjutnya akan berpengaruh pada hubungan internal organisasi pada gilirannya dapat ditentukan faktor kunci keberhasilan antara lain :

1. **Lingkungan Internal**
   - ❖ Kekuatan ;
     a. Visi dan misi organisasi yang jelas
        Kekuatan hukum tentang tugas pokok dan fungsi kecamatan
        Adanya alokasi anggaran bagi kecamatan
     b. Kewenangan koordinasi di tingkat kecamatan
        Adanya sarana dan prasarana

   - ❖ Kelemahan ;
     a. Jumlah dan kualitas SDM yang belum memadai.
     b. Lemahnya pelaksanaan koordinasi dengan pemerintahan kabupaten dan instansi teknis lainnya
     c. Belum tertib dan lemahnya sistem administrasi organisasi
        Belum optimalnya penyusunan kebijakan dan perencanaan

2. **Lingkungan Eksternal**
   - ❖ Peluang
     a. RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2024 – 2026
     b. Agenda pembangunan tahunan kabupaten Tangerang
     c. Tuntutan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dan akuntabilitas pemerintahan
     d. Komitmen Bupati dalam pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas prasarana wilayah dan pelayanan publik
     e. Keterkaitan institusional (koordinatif) pemerintahan yang ada di wilayah dengan kecamatan
     f. Dukungan dan partisipasi masyarakat luas
     g. Diklat peningkatan kualitas aparatur
     h. Kehidupan sosial, budaya dan keagamaan masyarakat
     i. Kebutuhan akan rasa aman, tertib dan tentram

   - ❖ Ancaman :
     a. Prasarana wilayah yang masih rendah dan kurang memadai

b. Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan
c. Pratek-praktek yang merusak akuntabilitas organisasi oleh aparaturnya
d. Kebijakan instansi teknis yang kurang mendukung pemberdayaan masayarakat.
e. Kecenderungan masyarakat untuk mengabaikan peraturan dan kewajiban yang mengikat.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Legok bahwa ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut:

a. Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Tangerang kepada Camat di bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Tangerang;
b. Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan insfrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh–sungguh memperhatikan Company/Coorperate Sosial Responsipility (CSR), maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
c. Pelayanan Prima. Kecamatan sebagai salah satu OPD di Pemerintah Kabupaten Tangerang yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika ativitas masyarakat;
d. Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur;

e. Arah Kebijakan dan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat tentang pengembangan bersama bidang pariwisata yang memiliki potensi wisata yang cukup layak untuk dikembangkan, maka Kecamatan Legok harus betul-betul memanfaatkan posisi dan potensi yang dimiliki, guna mendorong kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat;

a) Rancangan kerangka ekonomi daerah
b) Program prioritas pembangunan daerah dan
c) Rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan.

Berdasarkan analisis kebutuhan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam mencapai target yang telah direncanakan, beberapa penambahan Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Rencana Kerja Perubahan (Renja P) Kecamatan Legok Tahun 2025, antara lain :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, terdapat penambahan 1 Kegiatan, Administrasi Barang Milik Daerah dengan Sub Kegiatan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD.
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan terdapat penambahan 1 Kegiatan, Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan.
3. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerinatahan Desa, Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa terdapat beberapa penambahan Sub Kegiatan, antara lain :
    a. Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
    b. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
    c. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
    d. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa
    e. Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa

Rencana Kerja Kecamatan Legok berdasarkan RKPD Kabupaten Tangerang sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan Renja OPD se Kabupaten Tangerang yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di wilayah Kecamatan Legok. Untuk lebih jelasnya mengenai review rancangan awal RKPD Tahun 2024 dapat dilihat Tabel 2.4

Tabel T-C. 31

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025
KABUPATEN TANGERANG

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Sumber Dana
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
Kecamatan Legok											
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kec. Legok**	**Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Kec. Legok**	**100 %**	**10.358.942.609,00**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Kec. Legok**	**Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Kec. Legok**	**100 %**	**10.358.942.609,00**	**APBD**
a	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat daerah	Kec. Legok	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	9 dok	212.448.500,00	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat daerah	Kec. Legok	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	9 dok	212.448.500,00	APBD
b	Administrasi keuangan	Kec. Legok	Jumlah dokumen dokumen adminstrasi keuangan	2 Dok	7.054.086.145,00	Administrasi keuangan	Kec. Legok	Jumlah dokumen dokumen adminstrasi keuangan	2 Dok	7.054.086.145,00	APBD
c	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kec. Legok	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Dok	11.545.000,00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kec. Legok	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Dok	11.545.000,00	APBD

d	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Kec. Legok	Jumlah dokumen Pembinaan Pegawai	1 Dok	183.229.100,00	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Kec. Legok	Jumlah dokumen Pembinaan Pegawai	1 Dok	183.229.100,00	APBD
e	Administrasi umum perangkat daerah	Kec. Legok	Jumlah dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	8 Dok	813.712.400,00	Administrasi umum perangkat daerah	Kec. Legok	Jumlah dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	8 Dok	813.712.400,00	APBD
f	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Legok	Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah	1 Dok	160.734.500,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec.Legok	Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah	1 Dok	160.734.500,00	APBD
g	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang Urusan pemerintahan daerah	Kec. Legok	Jumlah dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Dok	688.178.164,00	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang Urusan pemerintahan daerah	Kec. Legok	Jumlah dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Dok	688.178.164,00	APBD
h	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan Daerah	Kec. Legok	Jumlah dokumen Jasa Penunjang	3 Dok	1.235.008.800,00	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan Daerah	Kec. Legok	Jumlah dokumen Jasa Penunjang	3 Dok	1.235.008.800,00	APBD
2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Kec. Legok**	**Persentase Pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara**	**91,94**	**1.288.434.000,00**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Kec. Legok**	**Persentase Pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara**	**91,94 %**	**1.288.434.000,00**	**APBD**
			Persentase Pemenuhan PATEN Sesuai Standar	**100 %**				**Persentase Pemenuhan PATEN Sesuai Standar**	**100 %**		**APBD**
a	Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah Yang ada di kecamatan	Kec. Legok	Jumlah Dokumen Laporan Pelayanan di Kecamatan Legok	2 Lap	64.927.000,00	Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah Yang ada di kecamatan	Kec. Legok	Jumlah Dokumen Laporan Pelayanan di Kecamatan Legok	2 Lap	64.927.000,00	APBD
b	Koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana Pelayanan umum	Kec. Legok	Jumlah Dokumen Pemeliharan	75 Dok	1.223.507.000,00	Koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana Pelayanan umum	Kec. Legok	Jumlah infrastruktur yang dipelihara	75 Dok	1.223.507.000,00	APBD

3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kec. Legok**	**Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan**	**100 %**	**1.322.198.900,,00**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kec. Legok**	**Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan**	**100 %**	**1.322.198.900,,00**	**APBD**
a	Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Kec. Legok	Jumlah Dokumen Laporan Pemberdayaan	11 Dok	891.329.700,00	Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Kec. Legok	Jumlah Dokumen Laporan Pemberdayaan	11 Dok	891.329.700,00	APBD
b	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kec. Legok	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	50 Kel	430.869.200,00	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kec. Legok	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	50 Kel	430.869.200,00	APBD
4	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Kec. Legok**	**Persentase Gangguan Trantibum yang ditindak Lanjuti**	**100 %**	**112.806.700,00**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Kec. Legok**	**Persentase Gangguan Trantibum yang ditindak Lanjuti**	**100 %**	**112.806.700,00**	**APBD**
a	Koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman Dan ketertiban umum	Kec. Legok	Jumlah Dokumen Gangguan Trantibum	24 Dok	112.806.700,00	Koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman Dan ketertiban umum	Kec. Legok	Jumlah Dokumen Gangguan Trantibum	24 Dok	112.806.700,00	APBD
5	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Kec. Legok**	**Persentase Rekomendasi yang ditindak lanjuti**	**100 %**	**464.757.000,00**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Kec. Legok**	**Persentase Rekomendasi yang ditindak lanjuti**	**100 %**	**464.757.000,00**	**APBD**

a	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. Legok	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi	6 Dok	464.757.000,00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. Legok	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi	6 Dok	464.757.000,00	APBD
6	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Kec. Legok**	Persentase Tertib Administrasi Pemerintahan Desa	**100 %**	**168.776.936,00**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Kec. Legok**	**Persentase Tertib Administrasi Pemerintahan Desa**	**100 %**	**168.776.936,00**	**APBD**
a	Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan Dan pengawasan pemerintahan desa	Kec. Legok	Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	10 Lap	168.776.936,00	Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan Dan pengawasan pemerintahan desa	Kec. Legok	Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	10 Lap	168.776.936,00	APBD
Kelurahan Babakan											
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kel. Babakan**	**-**	**100 %**	***946.088.275,00***	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Kel. Babakan**	**-**	**100 %**	***946.088.275,00***	**APBD**
a	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	Kel. Babakan	-	-	*128.729.600,00*	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	Kel. Babakan	-	-	*128.729.600,00*	APBD
b	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	Kel. Babakan	*Jumlah dokumen Jasa Penunjang*	3 Dok	*447.800.800,00*	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	Kel. Babakan	*Jumlah dokumen Jasa Penunjang*	3 Dok	*447.800.800,00*	APBD
c	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	Kel. Babakan	*Jumlah dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	3 Dok	*369.557.875,00*	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*		*Jumlah dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	3 Dok	*369.557.875,00*	APBD
2	***PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK***	**Kel. Babakan**	***Persentase Pemenuhan PATEN Sesuai Standar***	***92,00***	***437.265.000,00***	***PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK***	**Kel. Babakan**	***Persentase Pemenuhan PATEN Sesuai Standar***	***92,00***	***437.265.000,00***	**APBD**
			Persentase Pemeliharaan Fasilitas	***100***				***Persentase Pemeliharaan Fasilitas***	***100***		

			Umum yang terpelihara					***Umum yang terpelihara***			
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kel. Babakan	*Jumlah Dokumen Laporan Pelayanan di Kecamatan Legok*	2 Lap	*437.265.000,00*	*Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan*	Kel. Babakan	*Jumlah Dokumen Laporan Pelayanan di Kecamatan Legok*	2 Lap	*437.265.000,00*	APBD
			Jumlah Dokumen Pemeliharan	75 Dok				*Jumlah Dokumen Pemeliharan*	75 Dok		
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Kel. Babakan**	***Persentase Lembaga Masyarakat yang mendapat Pembinaan/Pemberdayaan***	**100**	***1.019.630.308,00***	***PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN***	**Kel. Babakan**	***Persentase Lembaga Masyarakat yang mendapat Pembinaan/Pemberdayaan***	**100**	***1.019.630.308***	**APBD**
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kel. Babakan	*Jumlah Dokumen Laporan Pemberdayaan di Kelurahan*	3 Dok	*1.019.630.308,00*	*Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan*	Kel. Babakan	*Jumlah Dokumen Laporan Pemberdayaan di Kelurahan*	100	*1.019.630.308*	APBD
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Kel. Babakan**	***Persentase Gangguan Trantibum yang ditindak Lanjuti***	**100**	***116.056.417,00***	***PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM***	**Kel. Babakan**	***Persentase Gangguan Trantibum yang ditindak Lanjuti***	**100**	***116.056.417,00***	**APBD**
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kel. Babakan	*Jumlah Dokumen Gangguan Trantibum*	24 Dok	*116.056.417,00*	*Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum*	Kel. Babakan	*Jumlah Dokumen Gangguan Trantibum*	24 Dok	*116.056.417,00*	APBD
JUMLAH				**100 %**	***16.234.956.145,00***	**JUMLAH**			**100 %**	***16.234.956.145,00***	**APBD**

2.5. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum dan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati dalam rangka penguatan otonomi daerah diarahkan pada :

1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan;
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan;
3. Meningkatnya Kinerja Pemerintahan;

Hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan Perangkat Daerah, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah Kecamatan Legok yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Kabupaten maupun berdasarkan hasil penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang Kecamatan yang telah dilaksanakan disajikan pada Tabel T-C.32 sebagai Berikut :

Tabel T-C. 32
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kecamatan Legok

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/ VOLUME	CATATAN
1	Rehab Berat Gedung Ex Kantor UPT Dinas Pendidikan	Kelurahan Babakan	Pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan	600,000,000.00	
2	Rehab Berat Gedung Kantor UPT PGRI Kecamatan	Kelurahan Babakan	Pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan	500,000,000.00	
3	Pembangunan Gedung Sekolah SMPN 3 Legok	Desa Caringin	Pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan	4,000,000,000.00	
4	Tambahan Kelas Tingkat Suntik SMPN 2 Legok	Desa Bojongkamal	Pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan	400,000,000.00	
5	Pemagaran Sekolah SDN II Cirarab	Desa Cirarab	Pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan	300,000,000.00	
6	Penambahan Ruang Kelas Tingkat Suntik SDN Ciangir I	Desa Ciangir	Pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan	600,000,000.00	
7	Relokasi Bangunan Sekolah SDN Caringin I	Desa Caringin	Pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan	2,750,000,000.00	
8	Tambah ruang kelas suntik SDN Babat	Desa Babat	Pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan	600,000,000.00	
9	Rehab Berat Ruang Kelas SDN Palasari I	Desa Palasari	Pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan	450,000,000.00	
10	Rehab Berat Ruang Kelas SDN Palasari IV	Desa Palasari	Pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan	450,000,000.00	
11	Tambah Ruang Kelas SDN Legok II	Kelurahan Babakan	Pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan	600,000,000.00	
12	Sanitasi Sekolah MIN 5 Tangerang	Desa Rancagong	Pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan	160,000,000.00	
13	Pemagaran dan Rehab Ruang Kelas MIN 5 Tangerang	Desa Rancagong	Pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan	450,000,000.00	
14	RKB (Ruang Kelas Baru) SDN Serdangwetan	Desa Serdang Wetan	Pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan	1,200,000,000.00	
15	Rehab Ruang Kelas SDN Candu I	Desa Serdang Wetan	Pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan	800,000,000.00	
16	Rehab Kantor Guru, Kepala sekolah dan Ruang Kelas SDN Rancagong II	Desa Rancagong	Pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan	1,500,000,000.00	
17	Renovasi Pustu Puskesmas Bojongkamal	Desa Babat	Pemenuhan sarana dan prasarana Kesehatan	200,000,000.00	
18	Pengadaan Pagar Puskesmas Bojongkamal	Desa Bojongkamal	Pemenuhan sarana dan prasarana Kesehatan	250,000,000.00	
19	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan (Mediatron dan Papan Informasi Pelayanan Puskesmas Bojongkamal	Desa Bojongkamal	Pemenuhan sarana dan prasarana Kesehatan	150,000,000.00	
20	Pembangunan Pustu di 2 Desa Puskesmas Legok	Kelurahan Babakan	Pemenuhan sarana dan prasarana Kesehatan	200,000,000.00	
21	Pembangunan kamar mandi dan septictank sebanyak 20 titik Puskesmas Legok	Desa Palasari	Pemenuhan sarana dan prasarana Kesehatan	200,000,000.00	

22	Pembangunan pagar pembatas dan pos keamanan gedung puskesmas bagian belakang Puskesmas Caringin	Desa Caringin	Pemenuhan sarana dan prasarana Kesehatan	250,000,000.00	
23	Pembuatan pos jaga keamanan Puskesmas Caringin	Desa Caringin	Pemenuhan sarana dan prasarana Kesehatan	100,000,000.00	
24	Revitalisasi Pasar Legok	Kelurahan Babakan	Peningkatan roda Perekonomian Masyarakat Kecamatan Legok	5,000,000,000.00	
25	Pengadaan Hand Traktor Pertanian	Desa Caringin	Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	385,000,000.00	
26	Kegiatan intensifikasi pekarangan	Desa Caringin	Pengembangan investasi, produk unggulan, pariwisata dan ekonomi kreatif	550,000,000.00	
27	Pengadaan Sarana dan alat pengembangan kampung budaya (gerbang,panggung,jalan,media pameran)	Desa Kemuning	Pengembangan investasi, produk unggulan, pariwisata dan ekonomi kreatif	350,000,000.00	
28	Pengadaan Alat dan media pelatihan (Edukasi budaya dan sejarah)	Desa Kemuning	Pengembangan investasi, produk unggulan, pariwisata dan ekonomi kreatif	250,000,000.00	
29	Anggaran event regular bulanan dan tahunan	Desa Kemuning	Pengembangan investasi, produk unggulan, pariwisata dan ekonomi kreatif	400,000,000.00	
30	Pembangunan Destinasi Wisata Danau (Legok Permai)	Desa Legok	Pengembangan investasi, produk unggulan, pariwisata dan ekonomi kreatif	1,500,000,000.00	
31	Tanggul Penahan Banjir	Kelurahan Babakan	Peningkatan Infrastruktur wilayah Kecamatan Legok	200,000,000.00	
32	Betonisasi	Desa Bojongkamal	Peningkatan Infrastruktur wilayah Kecamatan Legok	300,000,000.00	
33	Betonisasi	Desa Bojongkamal	Peningkatan Infrastruktur wilayah Kecamatan Legok	150,000,000.00	
34	Peningkatan Hotmix	Desa Rancagong	Peningkatan Infrastruktur wilayah Kecamatan Legok	250,000,000.00	
35	Peningkatan Hotmix	Desa Rancagong	Peningkatan Infrastruktur wilayah Kecamatan Legok	200,000,000.00	
36	Betonisasi	Desa Babat	Peningkatan Infrastruktur wilayah Kecamatan Legok	500,000,000.00	
37	Betonisasi	Desa Babat	Peningkatan Infrastruktur wilayah Kecamatan Legok	300,000,000.00	
38	Drainase/Uditch	Desa Ciangir	Peningkatan Infrastruktur wilayah Kecamatan Legok	300,000,000.00	
39	Betonisasi	Desa Ciangir	Peningkatan Infrastruktur wilayah Kecamatan Legok	600,000,000.00	
40	Pembangunan Turap	Desa Serdangwetan	Peningkatan Infrastruktur wilayah Kecamatan Legok	400,000,000.00	
41	Pemagaran	Desa Serdangwetan	Peningkatan Infrastruktur wilayah Kecamatan Legok	1,200,000,000.00	
42	Pembangunan Gapura Perbatasan Legok - Bojong Nangka	Desa Legok	Peningkatan Infrastruktur wilayah Kecamatan Legok	300,000,000.00	
43	Betonisasi	Desa Legok	Peningkatan Infrastruktur wilayah Kecamatan Legok	300,000,000.00	

44	Betonisasi	Desa Palasari	Peningkatan Infrastruktur wilayah Kecamatan Legok	450,000,000.00	
45	Betonisasi	Desa Palasari	Peningkatan Infrastruktur wilayah Kecamatan Legok	300,000,000.00	
46	Betonisasi	Desa Kemuning	Peningkatan Infrastruktur wilayah Kecamatan Legok	250,000,000.00	
47	Drainase/Uditch	Desa Kemuning	Peningkatan Infrastruktur wilayah Kecamatan Legok	200,000,000.00	
48	Rehab Rumah Tidak Layak Huni	Desa Caringin	Peningkatan Infrastruktur wilayah Kecamatan Legok	700,000,000.00	
49	Perbaikan gerbang dan pagar BPP caringin	Desa Caringin	Peningkatan Infrastruktur wilayah Kecamatan Legok	250,000,000.00	
50	Pembangunan Pagar Kecamatan Legok	Desa Caringin	Penyediaan Sarana dan Prasarana	500,000,000.00	

BAB III
RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja Perubahan dan pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Legok pada tahun 2025, sebagai rangkaian Penyusunan Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kecamatan Legok Tahun 2025 dengan mempedomi Undang-Undang nomor 14 tahun 2004 tentang sistem perencanaan nasional Undang-Undang Nomor 23 tahun tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah , Tata Cara Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomerklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

Adapun faktor – faktor yang menjadi pertimbangan dalam menyusun rencana kerja perubahan dan pendanaan adalah :

1. Program dan Kegiatan yang bersifat rutin se tiap tahun.
2. Program dan Kegiatan yang bersifat mendesak untuk dilakukan.
3. Program dan Kegiatan dibidang pembangunan fisik, Ekonomi, Sosial budaya yang menjadi skala prioritas dimasing – masing Desa / Kelurahan se Kecamatan Legok.

Total kebutuhan dana / pagu indikator yang dirinci menurut sumber pendanaannya adalah sebagai berikut :

Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikator
Kecamatan Legok Kabupaten Tangerang

Kode Rek						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025			
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
1						2	3	4	5	6	7
						UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN LEGOK				**24.393.785.186,00**	
7	**01**					**KECAMATAN**				**21.902.470.179**	
7	**01**	**01**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan**		**100 Persen**	**10.646.831.179**	
7	01	01	2	01		Keg. Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasikinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun		9 Dokumen	170.585.800	
7	01	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Tangerang, Legok, Semua Kel/Des	4 Dokumen	87.138.800,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
7	01	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Tangerang, Legok, Semua Kel/Des	4 Dokumen	29.717.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
7	01	01	2	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Tangerang, Legok, Semua Kel/Des	1 Laporan	53.730.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
7	01	01	2	02		Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen adminstrasi keuangan		2 Dokumen	7.151.882.873,00	
7	01	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Tangerang, Legok, Semua Kel/Des	31 Orang/bulan	7.126.238.873,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
7	01	01	2	02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Tangerang, Legok, Semua Kel/Des	2 Laporan	25.644.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
7	01	01	2	03		Keg. Administrasi Barang Milik Daerah Kepada Perangkat Daerah	Jumlah Lapoan Hasil Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		2 Dokumen	6.854.400,00	
7	01	01	2	03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Tangerang,	2 Laporan	6.854.400,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)

								Legok, Semua Kel/Des			
7	01	01	2	05		Keg. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pembinaan Pegawai		1 Dokumen	206.539.000,00	
7	01	01	2	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Tangerang, Legok, Semua Kel/Des	30 Paket	107.830.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
7	01	01	2	05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Tangerang, Legok, Semua Kel/Des	60 Orang	98.709.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
7	01	01	2	06		Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah		8 Dokumen	662.171.600,00	
7	01	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Tangerang, Legok, Semua Kel/Des	14 Paket	29.115.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
7	01	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Tangerang, Legok, Semua Kel/Des	26 Paket	255.316.400,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
7	01	01	2	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Tangerang, Legok, Semua Kel/Des	20 Paket	31.355.200,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
7	01	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Tangerang, Legok, Semua Kel/Des	45 Paket	83.506.600,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
7	01	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Tangerang, Legok, Semua Kel/Des	13 Paket	80.972.400,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
7	01	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Tangerang, Legok, Semua Kel/Des	4 Dokumen	60.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
7	01	01	2	06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Tangerang, Legok, Semua Kel/Des	8 Laporan	66.180.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
7	01	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Tangerang, Legok, Semua Kel/Des	2 Laporan	55.726.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
7	01	01	2	07		Keg. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah		1 Dokumen	112.325.000,00	

7	01	01	2	07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Tangerang, Legok, Semua Kel/Des	13 Unit	112.325.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
7	01	01	2	08		Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen Jasa Penunjang		3 Dokumen	1.417.770.218,00	
7	01	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Tangerang, Legok, Semua Kel/Des	2 Laporan	1.335.450,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
7	01	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Tangerang, Legok, Semua Kel/Des	1 Laporan	359.375.200,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
7	01	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Tangerang, Legok, Semua Kel/Des	23 Laporan	1.057.059.568,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
7	01	01	2	09		Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3 Dokumen	918.702.288,00	
7	01	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Tangerang, Legok, Semua Kel/Des	5 Unit	207.623.152,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
7	01	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Tangerang, Legok, Semua Kel/Des	3 Unit	182.929.136,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
7	01	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Tangerang, Legok, Semua Kel/Des	25 Unit	41,550,000.00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
7	01	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Tangerang, Legok, Semua Kel/Des	8 Unit	486.600.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
7	**01**	**02**				**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Pemenuhan PATEN Sesuai Standar** **Persentase Pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara**		**100 Persen** **91,94 Persen**	**8.996.964.000**	
7	01	02	2	02		Keg. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Pelayanan di Kecamatan Legok		2 Laporan	494.233.121,00	
7	01	02	2	02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Tangerang, Legok, Semua Kel/Des	4 Laporan	34.337.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)

7	01	02	2	03		Keg. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Laporan Pemeliharan		75 Dokumen	8.962.627.000,00	
7	01	02	2	03	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kab. Tangerang, Legok, Semua Kel/Des	75 Dokumen	8.962.627.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
7	**01**	**03**				**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Lembaga Masyarakat yang mendapat Pembinaan/Pemberdayaan**		**100 Persen**	**1.660.724.400,00**	
7	01	03	2	01		Keg. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Pemberdayaan		11 Dokumen	1.334.357.000,00	
7	01	03	2	01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kab. Tangerang, Legok, Semua Kel/Des	10 Lembaga Kemasyarakatan	112.940.400,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
7	01	03	2	01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Tangerang, Legok, Semua Kel/Des	7 Laporan	1.221.416.600,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
7	01	03	2	06		Keg. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara		50 Keluarga	326.367.400,00	
7	01	03	2	06	01	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Kab. Tangerang, Legok, Semua Kel/Des	50 Keluarga	326.367.400,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
7	**01**	**04**				**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Gangguan Trantibum yang ditindak Lanjuti**		**100 Persen**	**93.685.000,00**	
7	01	04	2	01		Keg. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Gangguan Trantibum		8 Dokumen	93.685.000,00	
7	01	04	2	01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kab. Tangerang, Legok, Semua Kel/Des	8 Dokumen	93.685.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
7	**01**	**05**				**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Prosentase Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan**		**100 Persen**	**371.262.400,00**	
7	01	05	2	01		Keg. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi		2 Dokumen	279.276.400,00	

7	01	05	2	01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kab. Tangerang, Legok, Semua Kel/Des	50 Orang	279.276.400,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
7	01	05	2	01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kab. Tangerang, Legok, Semua Kel/Des	4 Dokumen	91.986.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
7	**01**	**06**				**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Tertib Administrasi Pemerintahan Desa**		**100 Persen**	**133.003.200,00**	
7	01	06	2	01		Keg. Fasilitasi, Rekomendasi Dan Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa		10 Laporan	133.003.200,00	
7	01	06	2	01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kab. Tangerang, Legok, Semua Kel/Des	10 Dokumen	8.827.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
7	01	06	2	01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kab. Tangerang, Legok, Semua Kel/Des	10 Dokumen	81.586.200,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
7	01	06	2	01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kab. Tangerang, Legok, Semua Kel/Des	10 Dokumen	16.120.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
7	01	06	2	01	07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Kab. Tangerang, Legok, Semua Kel/Des	10 Dokumen	8.060.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
7	01	06	2	01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kab. Tangerang, Legok, Semua Kel/Des	10 Dokumen	18.410.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
7	***01***					**KELURAHAN BABAKAN**				***2.491.315.007,00***	
7	***01***	***01***				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**		**-**	**1.056.399.173,00**	
7	*01*	*01*	*2*	*06*		*Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*-*		*-*	*137.852.050,00*	

7	*01*	*01*	*2*	*06*	*01*	*Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	*Kab. Tangerang, Legok, Babakan*	*5 Paket*	*4.740.800,00*	*Pendapatan Asli Daerah (PAD)*
7	*01*	*01*	*2*	*06*	*02*	*Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	*Kab. Tangerang, Legok, Babakan*	*10 Paket*	*96.594.900,00*	*Pendapatan Asli Daerah (PAD)*
7	*01*	*01*	*2*	*06*	*03*	*Penyediaan Bahan Logistik Kantor*	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	*Kab. Tangerang, Legok, Babakan*	*3 Paket*	*14.203.750,00*	*Pendapatan Asli Daerah (PAD)*
7	*01*	*01*	*2*	*06*	*05*	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	*Kab. Tangerang, Legok, Babakan*	*3 Paket*	*4.852.600,00*	*Pendapatan Asli Daerah (PAD)*
7	*01*	*01*	*2*	*06*	*08*	*Fasilitasi Kunjungan Tamu*	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	*Kab. Tangerang, Legok, Babakan*	*78 Laporan*	*17.460.000,00*	*Pendapatan Asli Daerah (PAD)*
7	*01*	*01*	*2*	*08*		*Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Jumlah dokumen Jasa Penunjang*		*3 Dokumen*	*472.715.248,00*	
7	*01*	*01*	*2*	*08*	*01*	*Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	*Kab. Tangerang, Legok, Babakan*	*4 Laporan*	*775.012,00*	*Pendapatan Asli Daerah (PAD)*
7	*01*	*01*	*2*	*08*	*02*	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	*Kab. Tangerang, Legok, Babakan*	*2 Laporan*	*72.316.236,00*	*Pendapatan Asli Daerah (PAD)*
7	*01*	*01*	*2*	*08*	*04*	*Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	*Kab. Tangerang, Legok, Babakan*	*12 Laporan*	*399.624.000,00*	*Pendapatan Asli Daerah (PAD)*
7	*01*	*01*	*2*	*09*		*Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Jumlah dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*		*3 Dokumen*	*445.831.875,00*	
7	*01*	*01*	*2*	*09*	*06*	*Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	*Kab. Tangerang, Legok, Babakan*	*15 Unit*	*15.550.000,00*	*Pendapatan Asli Daerah (PAD)*
7	*01*	*01*	*2*	*09*	*09*	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	*Kab. Tangerang, Legok, Babakan*	*4 Unit*	*430.281.875,00*	*Pendapatan Asli Daerah (PAD)*
7	***01***	***02***				**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Pemenuhan PATEN Sesuai Standar** **Persentase Pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara**		**100 Persen** ***91.94 Persen***	**421.091.144,00**	

7	*01*	*02*	*2*	*02*		*Keg. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan*	*Jumlah Dokumen Laporan Pelayanan di Kecamatan Legok* *Jumlah Dokumen Pemeliharan*	*Kab. Tangerang, Legok, Babakan*	*2 Laporan* *75 Dokumen*	*421.091.144,00*	*Pendapatan Asli Daerah (PAD)*
7	*01*	*02*	*2*	*02*	*03*	*Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	*Kab. Tangerang, Legok, Babakan*	*3 Laporan*	*421.091.144,00*	*Pendapatan Asli Daerah (PAD)*
7	***01***	***03***				**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Lembaga Masyarakat yang mendapat Pembinaan/Pemberdayaan**		**100 Persen**	**898.152.190,00**	
7	*01*	*03*	*2*	*02*		*Keg. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan*	*Jumlah Dokumen Laporan Pemberdayaan di Kelurahan*		*3 Dokumen*	*898.152.190,00*	
7	*01*	*03*	*2*	*02*	*01*	*Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan*	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan*	*Kab. Tangerang, Legok, Babakan*	*5 Lembaga Kemasyarakatan*	*27.787.300,00*	*Pendapatan Asli Daerah (PAD)*
7	*01*	*03*	*2*	*02*	*02*	*Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan*	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*	*Kab. Tangerang, Legok, Babakan*	*5 Unit*	*500.440.000,00*	*Pendapatan Asli Daerah (PAD)*
7	*01*	*03*	*2*	*02*	*03*	*Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*	*Kab. Tangerang, Legok, Babakan*	*3 Pokmas / Ormas*	*369.924.890,00*	*Pendapatan Asli Daerah (PAD)*
7	***01***	***04***				**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Gangguan Trantibum yang ditindak Lanjuti**		**100 Persen**	**115.672.500,00**	
7	*01*	*04*	*2*	*01*		*Keg. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum*	*Jumlah Dokumen Gangguan Trantibum*		*8 Dokumen*	*115.672.500,00*	
7	*01*	*04*	*2*	*01*	*01*	*Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan*	*Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan*	*Kab. Tangerang, Legok, Babakan*	*6 Laporan*	115.672.500,00	*Pendapatan Asli Daerah (PAD)*

BAB IV
PENUTUP

a. Catatan Penting

Rencana Kerja Perubahan OPD Kecamatan Legok Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan OPD tahunan daerah yang berlandaskan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2025. Proses penyusunan RKPD Tahun 2025 berlandaskan pada prioritas pembangunan yang mendukung pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah sebagaimana tertuang dalam RPJMD. Hal ini dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah yang lebih efektif, efisien dan optimal dalam mencapai sasaran yang sudah ditetapkan.

Dengan memperhatikan kondisi dan situasi, tantangan, peluang, hambatan, dan kekuatan yang dimiliki, maka pada Tahun 2025 diperkirakan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Tangerang masih akan mengalami kehidupan yang dinamis dikarenakan merupakan pasca tahun politik baik di tingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten. Situasi yang dinamis tersebut memberikan kesempatan yang lebih luas bagi Kecamatan Pagedangan untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Renja Perubahan Kecamatan Legok Tahun 2025 yang telah tersusun akan memberikan arah dan pedoman bagi semua pemangku kepentingan di Kecamatan Pagedangan itu sendiri maupun pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan Kecamatan Pagedangan dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah direncanakan. Renja Kecamatan Legok Tahun 2025 yang telah disusun berdasarkan Indikasi Program Strategis Tahun 2024-2026 Perencanaan Kabupaten Tangerang sekiranya dapat benar-benar dilaksanakan secara konsisten terutama dalam pemenuhan anggaran pada proses pengangaran di APBD Tahun Anggaran 2025.

b. Kaidah – Kaidah Pelaksanaan

Dalam Renja Perubahan Tahun Anggaran 2025 Kecamatan Legok mendapat alokasi anggaran untuk Belanja Program sebesar Rp 24.023.336.413,- yang terdiri dari 6 program antara lain program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota, program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum, program program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, dan program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.

Adapun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa penambahan Kegiatan dan Sub Kegiatan sesuai dengan Kebutuhan belanja Tahun 2025 antara lain :

4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, terdapat penambahan 1 Kegiatan, Administrasi Barang Milik Daerah dengan Sub Kegiatan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD.
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan terdapat penambahan 1 Kegiatan, Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan.
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerinatahan Desa, Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa terdapat beberapa penambahan Sub Kegiatan, antara lain :

f. Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
g. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
h. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
i. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa
j. Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa

c. Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut terhadap Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 antara lain :

1. Dalam melaksanakan pekerjaannya diharapkan semua pegawai saling mendukung dan mengerti yang menjadi tupoksinya.
2. Agar dapat mengoptimalkan anggaran yang tersedia dalam pencapaian target sasaran dan tujuan organisasi.

Rencana Kerja Perubahan OPD Kecamatan Legok ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi OPD Kecamatan Legok Kabupaten Tangerang dalam menjalankan tugas dan fungsi OPD serta sebagai acuan dalam menyusun program/kegiatan OPD tahun 2025. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja Kecamatan Legok Kabupaten Tangerang tahun 2025 tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab seluruh Pegawai kantor Kecamatan Legok Kabupaten Tangerang serta peran aktif stakeholder yang bersangkutan.

37. Kecamatan Pasar Kemis

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan OPD tahun kedua pelaksanaan Renstra 2024-2026 yang disusun dengan memperhatikan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2004-2026 Kabupaten Tangerang. Dokumen ini juga merupakan sebagai instrumen dalam mengejawantahkan muatan-muatan yang terkandung pada Renstra Kecamatan Pasarkemis Tahun 2024-2026.

RENJA 2025 memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun oleh masyarakat yang diakomodir melalui kegiatan anggaran belanja Tahun 2025. Penyusunan Renja Kecamatan Pasarkemis merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, disusun menurut Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor *900.1.15.5-3406* Tahun 2024 tentang Perubahan Efisiensi Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Efisiensi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Lebih lanjut, Rencana kerja merupakan penjabaran operasionalisasi dari dokumen Rencana Strategis OPD yang telah disusun melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah. Rencana kerja menjadi perangkat penting dalam menjelaskan serangkaian tindakan yang bersifat operasional yang perlu dilakukan dalam jangka pendek untuk mencapai tujuan dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra OPD.

Rencana kerja merupakan instrumen penting bagi OPD dalam mengartikulasikan secara langsung tugas dan perannya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan isu-isu strategis dan pendekatan dalam memecahkan masalah. Rencana kerja OPD secara sistematis menggambarkan apa yang seharusnya dilakukan dan bagaimana mencapainya, sehingga memudahkan dalam mengukur target capaian kinerja dalam setiap tahapan pembangunan daerah. Melalui rencana kerja, masing-masing OPD dan pemangku kepentingan lain dapat menetapkan alternatif program atau kegiatan yang secara langsung berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pelayanan dan strategi intervensi yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Kecamatan Pasarkemis sebagai salah satu OPD di Pemerintah Kabupaten Tangerang juga mempunyai kewajiban menyusun rencana kerja sebagai dokumen perencanaan pembangunan

Kecamatan Pasarkemis sekaligus sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan pada Tahun 2025. Penyusunan rencana kerja Kecamatan Pasarkemis mempertimbangkan keintegrasian, keselarasan dan sinergitas dengan berbagai dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Ini perlu dilakukan agar tujuan dan sasaran pembangunan yang dirumuskan dapat lebih terarah, terpadu, saling mendukung, yang pada gilirannya seluruh tujuan dan sasaran yang terkait dengan urusan perencanaan dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif.

Berdasarkan landasan di atas, maka dengan optimalisasi sumber daya serta pembinaan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas, fungsi dan tata kerja yang baik dan tepat, diharapkan pelaksanaan RENJA yang dimiliki oleh Kecamatan Pasarkemis ini dapat berhasil.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana kerja Kecamatan Pasarkemis Tahun 2025 berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Efisiensi Keduaatas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Efisiensi Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Efisiensi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Efisiensi Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tangerang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 12);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1611);
11. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 33 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang;
12. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 39 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026;
13. Surat Edaran Bupati Tangerang Nomor *B/900.1.2.1/187/I/BAPPEDA/2024* tentang Penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan Pedoman Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tahun 2025.
14. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 20 tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

- **Maksud**

  Penyusunan Rencana kerja Kecamatan Pasarkemis dimaksudkan sebagai acuan atau pedoman bagi seluruh pejabat dan pelaksana Kecamatan Pasarkemis dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan.

- **Tujuan**

  Tujuan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Pasarkemis adalah agar pelaksanaan semua kegiatan bisa sesuai dengan jadwal, anggaran, dan sasaran sehingga secara keseluruhan berdampak pada peningkatan kinerja Kecamatan Pasarkemis di Tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyajian Rencana Kerja Kecamatan Pasar Kemis terdiri dari 5 (Lima) Bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Capaian
Renstra Perangkat Daerah
2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
2.4. Review Terhadap Rencana Awal RKPD
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Kecamatan Pasarkemis adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis, tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Pasarkemis ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan Pasarkemis selama Tahun 2025 pada **periode Triwulan I dan Triwulan II** dan perkiraan target tahun 2025. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut:

A. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitaf dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

B. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Tabel 2. 1
Capaian Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

No.	Uraian Indikator	Satuan	Kondisi Awal Kinerja	Kondisi Akhir Kinerja	Capaian
					%
1.	Nilai Pagu Triwulan 1	Nilai	13.600.390.458	12.533.212.225	92
2.	Nilai Pagu Triwulan 2	Nilai	9.915.331.170	7.502.871.071	80

Evaluasi Program Triwulan 1 dan 2 tahun 2025

Anggaran Triwulan 1 dan Triwulan 2 Kecamatan Pasarkemis adalah sebesar Rp. *22.795.721.628,-* terbilang (dua puluh dua miliar tujuh ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus dua puluh satu ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah) dengan 6 program dan 13 kegiatan. Dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp 20.036.083.296,- dengan capaian kinerja keuangan sebesar 90%.

Perkiraan pencapaian Tahun Anggaran 2025

Sedangkan untuk satu tahun penuh yakni Anggaran tahun 2025 dengan pagu sebesar Rp. 45.360.972.828,- (Empat puluh lima miliar tigaratus enampuluh juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus dua puluh delan rupiah) terurai dalam 6 program dan 15 kegiatan, diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100 % atau minimal meningkat dari Triwulan sebelumnya baik realisasi keuangan maupun realisasi fisik. Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada triwulan 1 dan 2 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2025, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan sebagai berikut:

a) Keterbatasan data dan informasi yang diperlukan bagi perencanaan pembangunan;
b) Belum optimalnya koordinasi dalam perencanaan pembangunan yang menyebabkan rendahnya keterpaduan dalam fungsi perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan;
c) Belum dipahaminya secara utuh tentang outcome yang ingin dicapai dari setiap kegiatan, sehingga masih adanya kesulitan merealisasikan sasaran program menjadi outcome kegiatan yang menunjang efektivitas program/kegiatan;
d) Perlunya peningkatan komitmen dan pemahaman untuk mempedomani indikasi kegiatan dalam Renstra, RKPD Tahun 2025 maupun dalam RPD 2024-2026 dalam merencanakan kegiatan.

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Pasarkemis dalam pelaksanaan urusan perencanaan pembangunan daerah, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur. Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra Kecamatan Pasarkemis Tahun 2024-2026, maka strategi dan kebijakan

yang akan ditempuh Kecamatan Pasarkemis pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- **STRATEGI**
  1. Memantapkan pemahaman terhadap tupoksi aparatur dan fungsi organisasi kecamatan dalam rangka meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat.
  2. Meningkatkan Pelayanan Prima/Pelayanan umum kepada masyarakat.
  3. Menciptakan kerjasama dengan instansi vertikal kecamatan untuk peningkatan SDM masyarakat.
  4. Menciptakan sumber sumber peningkatan pereknomian masyarakat yang berbasis potensi ekonomi masyarakat.
  5. Menciptakan terjadinya komitment pemerintahan kepada masyarakat dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan serta pengendalian dan pengawasan pembangunan.
  6. Menciptakan lingkungan kerja yang sinergis dan dapat bekerja sama secera efektif dan efisien dalam rangka meningkatkan kinerja aparatur Kecamatan dan aparatur kampung.
  7. Mengikutsertakan aparatur Kecamatan untuk mendapatkan diklat teknis, fungsional dan struktural dalam rangka meningkatkan SDM aparatur Kecamatan.
  8. Memperkuat komitmen seluruh komponen kecamatan Pasarkemis untuk mendukung terciptanya kondisi lingkungan yang bersih, aman, tertib, stabil, dinamis.
  9. Memfasilitasi kerjasama lembaga /organisasi kemasyarakatan dengan masyarakat dalam rangka mewujudkan lingkungan yang sehat dan tertata rapi dan serasi.
  10. Memfasilitasi kegiatan kelembagaan dalam rangka meningkatkan SDM masyarakat.

- **KEBIJAKAN**
  1. Peningkatan Kinerja aparatur Kecamatan.
  2. Peningkatan pelayanan prima kepada masyarakat.
  3. Mengupayakan kerjasama dengan instansi terkait dan lembaga- lembaga pendidikan, kesehatan dan agama untuk peningkatan SDM Masyarakat untuk mendukung lingkungan yang bersih, aman, tertib, stabil, dinamis dan tertata rapi.
  4. Mengupayakan peningkatan perekonomian masyarakat yang berbasis potensi ekonomi masyarakat.
  5. Mengupayakan terjadinya peningkatan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan serta pengendalian dan pengawasan pembangunan

Arah Kebijakan Kecamatan Pasarkemis

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan Kinerja Aparat Perangkat Daerah	Peningkatan Kualitas Aparat Perangkat Daerah

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kecamatan Pasarkemis Kabupaten Tangerang, merupakan Lembaga Teknis Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah dalam perencanaan pembangunan, Pencanangan pembangunan yang berkualitas dan professional dapat menjadi wahana untuk memperbaiki pola pembangunan di tingkat daerah, sehingga daerah dapat berkiprah dengan leluasa untuk membangun daerahnya sesuai potensi dan kemampuan yang ada (potensi lokal). Disisi lain, kondisi era globalisasi merupakan tantangan besar yang harus dan langsung dihadapi pemerintah dan masyarakat Kabupaten Tangerang.

Berdasarkan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 33 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, bahwa kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publikm dan pemberdayaan masyarakat dan kelurahan serta tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan Daerah.

- **Tugas Pokok dan Fungsi**

  Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2024, adalah sebagai berikut:

  a. Camat

  Bahwa Camat dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh perangkat kecamatan, yang terdiri dari: (a) Sekretariat; (b) Seksi; dan (c) Kelurahan.

  Camat, mempunyai tugas:

  a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
  c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
  d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
  e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
  f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
  g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;
  h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan; dan
  i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  Lebih lanjut dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Camat mempunyai fungsi:

a. penyiapan rumusan kebijakan teknis pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan, penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan, dan pelayanan publik yang menjadi ruang lingkup tugasnya di kecamatan;
b. penyiapan rencana dan program kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan, penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan, dan pelayanan publik yang menjadi ruang lingkup tugasnya di kecamatan;
c. penyiapan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan, penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan, dan pelayanan publik yang menjadi ruang lingkup tugasnya di kecamatan;
d. penyiapan pengawasan dan pengendalian kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan, penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan, dan pelayanan publik yang menjadi ruang lingkup tugasnya di kecamatan;
e. penyiapan bimbingan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan, penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan, dan pelayanan publik yang menjadi ruang lingkup tugasnya di kecamatan;
f. pengelolaan administrasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan

oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan, penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan, dan pelayanan publik yang menjadi ruang lingkup tugasnya di kecamatan; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh atasan.

b. Sekretaris

Sekretariat kecamatan dipimpin oleh Sekretaris kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Lebih lanjut Sekretariat kecamatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pembinaan dan pengendalian kegiatan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan program kerja, keuangan, serta pengkoordinasian tugas satuan organisasi di lingkungan kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Sekretariat kecamatan mempunyai fungsi :

a. penyiapan rumusan kebijakan teknis pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan, pengelolaan perencanaan program kerja kecamatan, evaluasi dan pelaporan;
b. penyiapan rencana dan program pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan, perencanaan program kerja kecamatan, evaluasi dan pelaporan;
c. penyiapan pengendalian pelaksanan urusan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan, perencanaan program kerja kecamatan, evaluasi dan pelaporan;
d. penyiapan bimbingan pelaksanaan urusan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan, perencanaan program kerja kecamatan, evaluasi dan pelaporan;
e. pengelolaan administrasi urusan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan dan Keuangan, perencanaan program kerja kecamatan, evaluasi dan pelaporan.

Lebih lanjut dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Sekretaris Kecamatan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

a. merencanakan perumusan kebijakan penyusunan Rencana strategis (Renstra) dan Rencana kerja (Renja) kecamatan serta perumusan bahan kebijakan program yang terkait dengan umum dan kepegawaian serta perencanaan dan keuangan;
b. membagi tugas program yang terkait dengan umum dan kepegawaian serta perencanaan dan keuangan;
c. memberi petunjuk program yang terkait dengan umum dan kepegawaian, serta perencanaan dan keuangan;
d. memberi petunjuk program;

e. mengatur program setiap satuan organisasi (kepala seksi dan lurah) di lingkungan kecamatan dalam perencanaan program, pelaksanaan kegiatan, evalusi dan pelaporan, umum dan kepegawaian serta perencanaan dan keuangan;
f. mengatur program yang terkait dengan umum dan kepegawaian meliputi mengevaluasi kebutuhan pegawai, perlengkapan, prasarana dan sarana di kecamatan, mengatur jumlah seluruh pelaksana kecamatan untuk ditempatkan pada setiap unit kerja sesuai kebutuhan dan keahlian;
g. mengatur program yang terkait dengan umum dan kepegawaian meliputi memelihara, mendayagunakan serta mendistribusikan prasarana dan sarana di lingkungan kecamatan agar efektif, mengatur administrasi umum dan kepegawaian kecamatan serta aset daerah di lingkungan tugasnya, mengatur surat menyurat, kearsipan, perjalanan dinas dan perlengkapan, urusan rumah tangga dan informasi kehumasan;
h. mengatur program yang terkait dengan perencanaan dan keuangan yang meliputi: menyelenggarakan administrasi keuangan dan penatausahaan keuangan kecamatan di lingkungan tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang- undangan yang berlaku;
i. mengevaluasi kegiatan program satuan organisasi (kepala seksi dan lurah) di lingkungan kecamatan dalam perencanaan program, pelaksanaan kegiatan, evaluasi dan pelaporan, umum dan kepegawaian serta perencanaan dan keuangan dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsi.

Sekretariat kecamatan terdiri dari Subbagian Umum dan Kepegawaian dan Subbagian Perencanaan dan Keuangan.

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris kecamatan. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan kegiatan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, kerumahtanggaan, dan kehumasan di lingkungan kecamatan.

Lebih lanjut dalam melaksanakan tugasnya Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai rincian tugas:

a. merencanakan kegiatan umum dan kepegawaian, program kerja operasional pelayanan administrasi

umum, kepegawaian, perlengkapan, kerumahtanggaan, dan informasi kehumasan di kecamatan;

b. membimbing pelaksanaan kegiatan umum yang meliputi: surat menyurat, penggandaan, pengiriman, pengarsipan, tata naskah dinas, inventarisasi aset dan persediaan pengadaan barang dan jasa, pendistribusian, stock opname, fasilitasi pengelola informasi dan dokumen (PID), perjalanan dinas dan pemeliharaan barang-barang inventaris;
c. membimbing pelaksanaan kegiatan kepegawaian meliputi: layanan administrasi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala (KGB), Daftar Urut Kepangkatan (DUK), data pegawai, kartu pegawai (Karpeg), Karis/Karsu, tunjangan anak/keluarga dan jabatan, asuransi kesehatan, tabungan pensiun, tabungan perumahan, pensiun, usulan formasi pegawai, usulan izin belajar, usulan diklat pegawai, usulan pemberian penghargaan dan tanda kehormatan, penilaian angka kredit jabatan fungsional, teguran disiplin pegawai, usulan cuti pegawai, usulan perpindahan/cuti pegawai, pengelolaan standar kompetensi pegawai (SKP);
d. membimbing pelaksanaan kegiatan umum dan kepegawaian yang meliputi: pembinaan dan pengembangan pegawai kecamatan, pembinaan dan supervisi pengelolaan dan pendayagunaan aset daerah yang dikelola oleh kelurahan, urusan rumah tangga dan informasi kehumasan di kecamatan;
e. membagi tugas pelaksanaan kegiatan umum meliputi: surat menyurat, penggandaan, pengiriman, pengarsipan, tata naskah dinas, inventarisasi aset dan persediaan pengadaan barang dan jasa, pendistribusian, stock opname, fasilitasi pengelola informasi dan dokumen (PID), perjalanan dinas dan pemeliharaan barang-barang inventaris;
f. membagi tugas pelaksanaan pelayanan administrasi kepegawaian di lingkup kecamatan yang meliputi layanan administrasi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala (KGB), Daftar Urut Kepangkatan (DUK), data pegawai, kartu pegawai (Karpeg), Karis/Karsu, tunjangan anak/keluarga dan jabatan, asuransi kesehatan, tabungan pensiun, tabungan perumahan, pensiun, usulan formasi pegawai, usulan izin belajar, usulan diklat pegawai, usulan pemberian penghargaan dan tanda kehormatan, penilaian angka kredit jabatan fungsional, teguran disiplin pegawai, usulan cuti pegawai, usulan perpindahan/cuti pegawai, pengelolaan standar kompetensi pegawai (SKP);
g. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan umum dan kepegawaian dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya;
h. membuat laporan pelaksanaan kegiatan umum dan kepegawaian yang meliputi: laporan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang, administrasi aset daerah di lingkup kecamatan, penilaian prestasi kerja pegawai

kecamatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Subbagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris kecamatan. Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan kegiatan penyusunan rencana dan program kerja kecamatan, serta pengelolaan administrasi dan pengelolaan keuangan kecamatan.

Lebih lanjut dalam melaksanakan tugasnya Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai rincian tugas:

a. merencanakan kegiatan perencanaan dan keuangan;
b. membimbing pelaksanaan kegiatan perencanaan yang meliputi : RPJMD, Rencana strategis, Rencana kerja, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja, penyusunan dokumen RKA/DPA, RRKA/DPPA, Forum SKPD, monitoring dan evaluasi, pelaksanaan pengembangan e-goverment, serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, melakukan pengoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan kecamatan meliputi Rencana strategis (Renstra), Rencana kerja (Renja), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), dan Penetapan Kinerja (PK);
c. membimbing pelaksanaan kegiatan administrasi keuangan yang meliputi: pengajuan Surat Membayar Uang Persediaan, Ganti Uang, Tambahan Uang, LS Bendahara, LS Pihak Ketiga dan Ganti Uang Nihil, pencairan, pencatatan, pembukuan, serta pelaporan pertanggungjawaban anggaran;
d. membagi tugas pelaksanaan kegiatan administrasi perencanaan yang meliputi: RPJMD, Rencana strategis, Rencana kerja, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja, Penyusunan dokumen RKA/DPA, RRKA/DPPA, Fasilitasi Perencanaan SKPD, monitoring dan evaluasi, e-Reporting, reviu penyerapan anggaran, data pembangunan SKPD serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
e. membagi tugas pelaksanaan kegiatan administrasi keuangan yang meliputi: pengajuan Surat Membayar Uang Persediaan, Ganti Uang, Tambahan Uang, LS Bendahara, LS Pihak Ketiga dan Ganti Uang Nihil, pencairan, pencatatan, pembukuan, serta pelaporan pertanggungjawaban anggaran;
f. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan perencanaan dan keuangan dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya;

g. membuat laporan pelaksanaan kegiatan perencanaan dan keuangan yang meliputi: Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Efisiensi Ekuitas (LPE) dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK), dan RPJMD, Rencana strategis, Rencana kerja, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja, penyusunan dokumen RKA/DPA, RRKA/DPPA, Fasilitasi Perencanaan SKPD, monitoring dan evaluasi, e-Reporting, reviu penyerapan anggaran, data Pembangunan SKPD, pelaksanaan pengembangan e-goverment serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

c. Seksi Pemerintahan

Seksi pemerintahan dipimpin oleh Kepala seksi Pemerintahan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris kecamatan. Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melakukan penyusunan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan umum, pengoordinasian kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan, serta pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa dan kelurahan.

Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai rincian tugas:

a. merencanakan kegiatan pemerintahan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
b. membimbing pelaksanaan kegiatan pemerintahan umum yang meliputi pengelolaan profil dan monografi desa/kelurahan serta kecamatan, pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan bimbingan teknis, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional, pembinaan persatuan dan kesatuan balgsa, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional, penanganErn konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila, dan pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal serta pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di Kecamatan;
c. membagi tugas pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan pemerintahan umum;

d. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pemerintahan umum;
e. membuat laporan pelaksanaan kegiatan pemerintahan umum;
f. mengumpulkan bahan dan melaksanakan kebijakan Camat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan atau didelegasikan Bupati kepada Camat sesuai dengan lingkup tugasnya;
g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh Kepala seksi Pemberdayaan Masyarakat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris kecamatan. Tugas seksi Pemberdayaan Masyarakat adalah melakukan penyusunan kegiatan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial di kecamatan.

Kepala seksi Pemberdayaan masyarakat mempunyai rincian tugas:

a. merencanakan kegiatan yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat;
b. membimbing pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat, yang meliputi peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan, sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kefa Kecamatan, peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa dan Kelurahan, pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan, pemberdayaan masyarakat di kelurahan, evaluasi Kelurahan, penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan, peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan, penyediaan sarana dan prasarana lembaga kemasyarakatan, dan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat, serta fasilitasi pemanfaatan teknologi tepat guna;
c. membimbing pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
d. membimbing pelaksanaan kegiatan penanggulangan masalah pencemaran lingkungan, serta masalah kesejahteraan sosial di Kecamatan dan koordinasi dengan satuan kerja Perangkat Daerah/instansi terkait (termasuk pembentukan dan penumbuhan karakter keluarga melalui peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya penghayatan dan pengamalan Pancasila dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, peningkatan

kesadaran keluarga dalam membangun kerja sama antar keluarga, warga, dan kelompok masyarakat, peningkatan ketahanan pangan keluarga, pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan penggunaan dan pemanfaatan sandang produksi dalam negeri, peningkatan kesadaran keluarga dalam mewujudkan rumah sehat dan layak huni serta kesadaran hukum tentang kepemilikan rumah, peningkatan kesadaran keluarga dalam peningkatan pendidikan dan keterampilan untuk mewujudkaa sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan derajat kesehatan keluarga dan lingkungan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan taraf hidup keluarga melalui kehidupan berkoperasi dan pengembangan ekonomi lainnya, penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan kualitas kelestarian lingkungan hidup, pelatihan keluarga tanggap bencana alam, pelatihan keluarga tanggap bencana rumah tangga, penumbuhan, dan peningkatan kesadaran keluarga dalam keterlibatan perencanaan kehidupan menuju keluarga berkualitas) ;

e. membagi tugas pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat;
f. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
g. membuat laporan pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat;
h. mengumpulkan bahan dan melaksanakan kebijakan Camat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan atau didelegasikan Bupati kepada Camat sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh Kepala seksi Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris kecamatan. Seksi Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyusunan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, serta penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di kecamatan. Lebih lanjut, rincian tugas Kepala seksi Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat adalah:

a. merencanakan kegiatan yang terkait dengan ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat,

membimbing pelaksanaan kegiatan tanggap bencana lingkup kecamatan;

b. membimbing pelaksanaan kegiatan koordinasi/ sinergi dengan Perangkat Daerah yang tugas darr fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
c. membimbing pelaksanaan kegiatan fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di desa dan kelurahan;
d. membimbing pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan yang meliputi koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia, serta pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan
e. membagi tugas pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat di desa dan kelurahan;
f. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya.;
g. membuat laporan pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat;
h. mengumpulkan bahan dan melaksanakan kebijakan Camat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan atau didelegasikan Bupati kepada Camat sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

f. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Seksi Pembinaan dan Pengawasan Desa dipimpin oleh Kepala seksi Pembinaan dan Pengawasan Desa yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris kecamatan. Lebih lanjut Seksi Pembinaan dan Pengawasan Desa mempunyai tugas melakukan penyusunan kegiatan bidang pembinaan dan pengawasan pemerintahan. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Desa mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

a. merencanakan kegiatan yang terkait dengan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa;
b. membimbing pelaksanaan kegiatan fasilitasi pen5rusunan peraturan Desa dan peraturan Kepala Desa, fasilitasi administrasi tata Pemerintahan Desa, fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset desa, fasilitasi penerapal dan penegakan peraturan perundang-undangan, fasilitasi pelaksanaan tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa, fasilitasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, fasilitasi

pelaksanaan tugas dan fungsi BPD, dan rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa;

c. membimbing dan mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa/Kelurahan dan Kecamatan, fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan Daerah dengan pembangunan Desa, fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan, fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan, fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif, fasilitasi kerja sama antar Desa dan kerja sama Desa dengan pihat ketiga, fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang Desa serta penetapan dan penegasan batas Desa, fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa, koordinasi pendampingan Desa di wilayahnya, dan koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah Kecamatan;
d. membagi tugas pelaksanaan program kegiatan yang terkait dengan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa;
e. membuat laporan pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa;
f. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
g. mengumpulkan bahan dan melaksanakan kebijakan Camat dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintalan yang dilimpahkan/didelegasikan Bupati kepada Camat sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

g. Seksi Pelayanan

Seksi Pelayanan dipimpin oleh Kepala seksi Pelayanan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris kecamatan. Tugas Seksi Pelayanan adalah melakukan penyusunan kegiatan pelayanan publik lingkup bidang perizinan dan non perizinan sesuai dengan kewenangan kecamatan. Lebih lanjut, rincian tugas Kepala seksi Pelayanan adalah:

a. merencanakan kegiatan yang terkait dengan pelayanan;
b. membimbing pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
c. kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan, fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan, pendistribusian dan pengumpulal formulir pengukuran indeks kepuasan

masyarakat yang berasal dari Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan pelayanan publik, peningkatan efektMtas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan;

d. membimbing penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dengan perangkat daerah dan/atau instansi terkait lainnya;
e. membimbing pelaksanakan standar pelayanan publik, standar pelayanan minimal dan standar operasional prosedur pelayanan, pengaduan/keluhan dari masyarakat;
f. membimbing pelaksanaan kegiatan koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal terkait, peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
g. membimbing pelaksanaan kegiatan koordinasi/ sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal yarrg terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum, pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
h. membimbing pelaksanaan kegiatan pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan nonusaha, pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan nonperizinan, pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan;
i. membagi tugas pelaksanaan program kegiatan yang terkait dengan pelayanan yang meliputi;
j. membuat laporan pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan pelayanan;
k. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik;
l. mengumpulkan bahan dan melaksanakan kebijakan Camat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan atau didelegasikan bupati kepada Camat sesuai dengan lingkup tugasnya;
m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Kecamatan Pasarkemis selaku lembaga teknis di bidang perencana harus mampu menjawab tantangan tersebut diatas, keberhasilan suatu perencanaan dapat dilihat dari mulai proses penyampaian dengan tataran pelaksanaan/implementasi di lapangan, sehingga terwujud sinergi antara perencanaan pembangunan baik di tingkat Nasional, Provinsi maupun Kabupaten.

Melihat kondisi tersebut diatas Kecamatan Pasarkemis selaku salah satu OPD di Kabupaten Tangerang mencoba untuk mensinergikan proses

perencanaan baik tingkat pusat, provinsi dan kabupaten dalam rangka:

1) Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan.
2) Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun Antara Pusat dan Daerah.
3) Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
4) Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.
5) Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efesien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

- Pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Pasar Kemis dapat dilihat pada tabel 2.2.

Tabel 2. 2 Pencapaian Kinerja Kecamatan Pasar Kemis

No	Indikator	Target Renstra			Realisasi Capaian			Rasio Capaian			Catatan Analisis
		2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026	
1	Nilai AKIP Kecamatan Pasar Kemis	80	83	85	41,00	-	-	52	-	-	
2	Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat	87	90	95	91	-	-	101	-	-	

- Berdasarkan tabel di atas untuk pencapaian kinerja Kecamatan Pasar Kemis baru terisi di tahun 2024 di karenakan tahun 2025 dan 2026 masih dalam tahap penilaian adapun dari hasil Indikator Nilai AKIP Kecamatan Pasar kemis 2024 mendapatkan nilai 41 (Cukup) yang tidak memenuhi target sebesar 91 di karenakan masih kurangnya pemahaman dalam sistem penilaian yang di terapkan yakni menggunakan Aplikasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instransi Pemerintah secara elektronik (E-SAKIP). Sedangkan dari hasil indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Pasar Kemis realisasi Capaiannya sebesar 91 nilai tersebut melebihi dari target yang di tetapkan sebesar 87 penilaian tersebut di dapatkan dari Aplikasi SIKEPO.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Pasar Kemis

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Pasarkemis tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang

timbul dari permasalahan internal penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Kecamatan Pasarkemis, maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Pasarkemis sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

a. Kinerja pelayanan Kecamatan Pasarkemis terhadap target yang tercantum dalam Renstra Kecamatan Pasarkemis sampai dengan tahun 2024 sudah cukup baik, dimana sebagian target yang ditetapkan dapat dicapai.
b. Persentase usulan Musrenbang yang terakomodir dalam Renja sudah cukup baik, dan ke depan perlu terus diupayakan peningkatannya. Dalam pengakomodiran usulan Musrenbang juga perlu diperhatikan keterlibatan berbagai pihak, diantaranya organisasi/lembaga terkait pengarusutamaan gender serta keterlibatan peserta perempuan dalam Musrenbang, dimana hal ini terkait upaya mewujudkan perencanaan yang reponsif gender, namun hasil ini masih belum optimal jika dikaitkan dengan konsistensi perencanaan, dimana harus tercapai kesesuaian 100% sebagai perwujudan perencanaan yang ideal.

Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Pasarkemsi, yaitu sebagai berikut:

a. Tantangan

1) Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dunia.
   Ledakan teknologi informasi dan komunikasi telah membuka babak baru bagi masyarakat untuk memperoleh informasi secara otonom. Setiap orang memiliki akses terhadap sumber informasi dimanapun di dunia ini. Konsekuensinya, masyarakat menjadi kritis dan tanggap terhadap hal yang berkembang. Kecamatan Pasarkemis tertantang untuk memanfaatkan hal ini untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
2) Perkembangan Kabupaten Tangerang beserta seluruh permasalahannya.
   Sebagai sebuah kota berkembang, Kabupaten Tangerang memiliki permasalahan dalam berbagai aspek yang saling terkait. Diperlukan strategi tepat dan komitmen kuat dalam mengarahkan perkembangan Kabupaten Tangerang beserta penyelesaian seluruh permasalahannya.
3) Tingkat pemahaman masyarakat terhadap mekanisme perencanaan pembangunan, serta aspirasi dan tuntutan yang semakin beragam.
   Pemahaman masyarakat terhadap mekanisme perencanaan pembangunan harus terus ditingkatkan karena berpengaruh terhadap kualitas penyampaian aspirasi dan tuntutan masyarakat, yang seiring perkembangan Kabupaten Tangerang menjadi semakin beragam, sehinagga perlu diberikan ruang dalam penyamapaiannya, serta yang terpenting dalam pengakomodirannya, agar perencanaan pembangunan daerah dapat lebih berkualitas dan tepat sasaran.
4) Dinamika regulasi dan kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait perencanaan pembangunan daerah.

Regulasi dari Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait perencanaan pembangunan daerah yang cukup dinamis menuntut sumber daya aparatur Kecamatan Pasarkemis agar memiliki kapasitas yang cukup untuk terus dapat mengikuti dan menerapkan perkembangan regulasi tersebut.

b. Peluang

1) Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat dan tak terbatas harus dimanfaatkan dengan tepat guna mendukung peningkatan kinerja pelayanan secara transparan, cepat dan berkualitas.
2) Tersedianya potensi sumber daya aparatur yang harus dikelola dengan tepat, terutama dengan cara ditingkatkan kapasitasnya melalui pendidikan formal maupun non formal, agar dapat berperan optimal dalam mendukung kinerja peberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakkan Perda dan Peraturan Bupati, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan dan kelurahan.
3) Kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah, baik secara individu, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Perguruan Tinggi, dan stakeholder lainnya dalam proses perencanaan pembangunan harus dimanfaatkan secara tepat untuk meningkatkan kualias perencanaan pembangunan di kecamatan dan kelurahan.
4) Tersedianya reguali dan kebijakan yang mendukung perencanaan pembangunan daerah, disamping menjadi tantangan juga sekaligus menjadi peluang, karena berperan dalam mendorong peningkatan kinerja perencanaan pembangunan daerah.

2.4 Review Terhadap Rencana Perubahan Efisiensi Efisiensi RKPD

Dalam dokumen RPD Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026 sebagaimana yang telah dilegalisasi melalui Peraturan Bupati Tangerang Nomor 39 Tahun 2024, bahwasanya tujuan dan sasaran yang terkandung dalam dokumen RPD ini berpedoman pada visi dan misi RPJPD Kabupaten Tangerang Tahun 2004-2026. Visi pembangunan Kabupaten Tangerang yaitu “Kabupaten Tangerang Berdaya Saing Menuju Masyarakat Madani. ” dengan 5 (lima) misi pembangunan meliputi:

1) Mewujudkan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Tangerang yang mandiri, berdayasaing tinggi dan berakhlak mulia;
2) Mewujudkan perekonomian daerah yang maju dan berdaya saing berbasis pada potensi keunggulan lokal;
3) Mewujudkan pelayanan dasar bagi masyarakat secara merata dan proporsional;
4) Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, demokratis dan partisipatif; dan
5) Mewujudkan pembangunan yang terpadu dan serasi dengan pendekatan pengembangan wilayah berbasis ekonomi dan ekologi.

Secara umum arah kebijakan RKPD Tahun 2025, difokuskan pada ”Pemerataan Pembangunan Berwawasan Lingkungan Dalam Upaya Peningkatan Daya Saing Daerah Melalui Kolaborasi Antar Sektor”. Proses review rancangan awal RKPD Tahun 2025 adalah membandingkan antara rancangan awal RKPD Tahun 2025 dengan analisis kebutuhan. Temuan proses reviu tersebut berupa identifikasi rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan yang sesuai namun besarannya berbeda, sebagaimana disajikan tabel berikut:

Tabel 2. 3 Efisiensi RKPD Tahun 2025

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

FORMULIR DPPA-BELANJA SKPD

KAB. TANGERANG TAHUN ANGGARAN 2025

Nomor DPPA : DPPA/A.2/7.01.0.00.0.00.06.0000/002/2025

SKPD : 7.01.0.00.0.00.06.0000 - Kecamatan Pasar Kemis

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											
									Tahun									Bertambah / (Berkurang)	
									Sebelum					Setelah					
								T- 1	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%
7.01.0.00.0.00.06.0000 - Kecamatan Pasar Kemis									Rp18.523.125.670,26	Rp15.673.161.193,04	Rp0,00	Rp0,00	Rp34.196.286.863,30	Rp17.961.212.150,26	Rp15.673.161.193,04	Rp0,00	Rp0,00	Rp33.634.373.343,30	(Rp561.913.520,00)	(1.67)
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**				Rp18.523.125.670,26	Rp15.673.161.193,04	Rp0,00	Rp0,00	Rp34.196.286.863,30	Rp17.961.212.150,26	Rp15.673.161.193,04	Rp0,00	Rp0,00	Rp33.634.373.343,30	(Rp561.913.520,00)	(1.67)
7	**01**				**KECAMATAN**				Rp18.523.125.670,26	Rp15.673.161.193,04	Rp0,00	Rp0,00	Rp34.196.286.863,30	Rp17.961.212.150,26	Rp15.673.161.193,04	Rp0,00	Rp0,00	Rp33.634.373.343,30	(Rp561.913.520,00)	(1.67)
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				Rp14.918.897.270,26	Rp477.917.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.396.814.670,26	Rp14.732.463.150,26	Rp477.917.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.210.380.550,26	(Rp186.434.120,00)	(1.23)
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				Rp215.049.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp215.049.000,00	Rp171.698.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp171.698.000,00	(Rp43.351.000,00)	(25.25)
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tangerang, Pasar Kemis, Semua Kelurahan/Desa		Rp61.620.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp61.620.000,00	Rp46.124.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp46.124.000,00	(Rp15.496.000,00)	(33.60)
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tangerang, Pasar Kemis, Semua Kelurahan/Desa		Rp66.509.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp66.509.000,00	Rp60.457.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp60.457.000,00	(Rp6.052.000,00)	(10.01)
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tangerang, Pasar Kemis, Semua Kelurahan/Desa		Rp86.920.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp86.920.000,00	Rp65.117.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp65.117.000,00	(Rp21.803.000,00)	(33.48)
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				Rp11.611.874.526,26	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.611.874.526,26	Rp11.598.779.406,26	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.598.779.406,26	(Rp13.095.120,00)	(0.11)
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tangerang, Pasar Kemis, Semua Kelurahan/Desa		Rp11.559.504.526,26	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.559.504.526,26	Rp11.559.504.526,26	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.559.504.526,26	Rp0,00	0.00
7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tangerang, Pasar Kemis, Semua Kelurahan/Desa		Rp52.370.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp52.370.000,00	Rp39.274.880,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp39.274.880,00	(Rp13.095.120,00)	(33.34)
7	**01**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**				Rp7.226.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.226.000,00	Rp5.231.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.231.000,00	(Rp1.995.000,00)	(38.14)
7	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp7.226.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.226.000,00	Rp5.231.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.231.000,00	(Rp1.995.000,00)	(38.14)

7	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				Rp75.640.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp75.640.000,00	Rp75.640.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp75.640.000,00	Rp0,00	0.00
7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tangerang, Pasar Kemis, Semua Kelurahan/Desa		Rp75.640.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp75.640.000,00	Rp75.640.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp75.640.000,00	Rp0,00	0.00
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				Rp572.848.900,00	Rp477.917.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.050.766.300,00	Rp444.855.900,00	Rp477.917.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp922.773.300,00	(Rp127.993.000,00)	(13.87)
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tangerang, Pasar Kemis, Semua Kelurahan/Desa		Rp18.720.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp18.720.000,00	Rp18.720.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp18.720.000,00	Rp0,00	0.00
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tangerang, Pasar Kemis, Semua Kelurahan/Desa		Rp0,00	Rp477.917.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp477.917.400,00	Rp0,00	Rp477.917.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp477.917.400,00	Rp0,00	0.00
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tangerang, Pasar Kemis, Semua Kelurahan/Desa		Rp124.895.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp124.895.900,00	Rp124.895.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp124.895.900,00	Rp0,00	0.00
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tangerang, Pasar Kemis, Semua Kelurahan/Desa		Rp108.513.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp108.513.000,00	Rp89.778.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp89.778.000,00	(Rp18.735.000,00)	(20.87)
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tangerang, Pasar Kemis, Semua Kelurahan/Desa		Rp28.800.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp28.800.000,00	Rp28.800.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp28.800.000,00	Rp0,00	0.00
7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tangerang, Pasar Kemis, Semua Kelurahan/Desa		Rp143.460.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp143.460.000,00	Rp113.676.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp113.676.000,00	(Rp29.784.000,00)	(26.20)
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tangerang, Pasar Kemis, Semua Kelurahan/Desa		Rp148.460.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp148.460.000,00	Rp68.986.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp68.986.000,00	(Rp79.474.000,00)	(115.20)
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				Rp1.592.652.268,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.592.652.268,00	Rp1.592.652.268,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.592.652.268,00	Rp0,00	0.00
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tangerang, Pasar Kemis, Semua Kelurahan/Desa		Rp270.848.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp270.848.700,00	Rp270.848.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp270.848.700,00	Rp0,00	0.00
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tangerang, Pasar Kemis, Semua Kelurahan/Desa		Rp1.321.803.568,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.321.803.568,00	Rp1.321.803.568,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.321.803.568,00	Rp0,00	0.00

7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				Rp843.606.576,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp843.606.576,00	Rp843.606.576,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp843.606.576,00	Rp0,00	0.00
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tangerang, Pasar Kemis, Semua Kelurahan/Desa		Rp71.699.984,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp71.699.984,00	Rp71.699.984,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp71.699.984,00	Rp0,00	0.00
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tangerang, Pasar Kemis, Semua Kelurahan/Desa		Rp361.956.592,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp361.956.592,00	Rp361.956.592,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp361.956.592,00	Rp0,00	0.00
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tangerang, Pasar Kemis, Semua Kelurahan/Desa		Rp109.950.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp109.950.000,00	Rp109.950.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp109.950.000,00	Rp0,00	0.00
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tangerang, Pasar Kemis, Semua Kelurahan/Desa		Rp300.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp300.000.000,00	Rp300.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp300.000.000,00	Rp0,00	0.00
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**				Rp1.021.368.400,00	Rp15.195.243.793,04	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.216.612.193,04	Rp1.011.154.400,00	Rp15.195.243.793,04	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.206.398.193,04	(Rp10.214.000,00)	(0.06)
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**				Rp44.444.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp44.444.000,00	Rp34.230.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp34.230.000,00	(Rp10.214.000,00)	(29.84)
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tangerang, Pasar Kemis, Semua Kelurahan/Desa		Rp44.444.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp44.444.000,00	Rp34.230.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp34.230.000,00	(Rp10.214.000,00)	(29.84)
7	**01**	**02**	**2.03**		**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**				Rp976.924.400,00	Rp15.195.243.793,04	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.172.168.193,04	Rp976.924.400,00	Rp15.195.243.793,04	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.172.168.193,04	Rp0,00	0.00
7	01	02	2.03	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tangerang, Pasar Kemis, Semua Kelurahan/Desa		Rp976.924.400,00	Rp15.195.243.793,04	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.172.168.193,04	Rp976.924.400,00	Rp15.195.243.793,04	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.172.168.193,04	Rp0,00	0.00
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**				Rp1.904.222.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.904.222.600,00	Rp1.691.589.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.691.589.200,00	(Rp212.633.400,00)	(12.57)
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**				Rp1.870.460.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.870.460.400,00	Rp1.661.832.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.661.832.000,00	(Rp208.628.400,00)	(12.55)
7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tangerang, Pasar Kemis, Semua Kelurahan/Desa		Rp87.166.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp87.166.600,00	Rp87.166.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp87.166.600,00	Rp0,00	0.00
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tangerang, Pasar Kemis, Semua Kelurahan/Desa		Rp1.783.293.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.783.293.800,00	Rp1.574.665.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.574.665.400,00	(Rp208.628.400,00)	(13.25)

7	**01**	**03**	**2.03**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**				Rp33.762.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp33.762.200,00	Rp29.757.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp29.757.200,00	(Rp4.005.000,00)	(13.46)
7	01	03	2.03	0005	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tangerang, Pasar Kemis, Semua Kelurahan/Desa		Rp33.762.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp33.762.200,00	Rp29.757.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp29.757.200,00	(Rp4.005.000,00)	(13.46)
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**				Rp38.677.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp38.677.000,00	Rp29.887.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp29.887.000,00	(Rp8.790.000,00)	(29.41)
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**				Rp38.677.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp38.677.000,00	Rp29.887.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp29.887.000,00	(Rp8.790.000,00)	(29.41)
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tangerang, Pasar Kemis, Semua Kelurahan/Desa		Rp38.677.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp38.677.000,00	Rp29.887.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp29.887.000,00	(Rp8.790.000,00)	(29.41)
					Vertikal di Wilayah Kecamatan															
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**				Rp495.963.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp495.963.400,00	Rp399.639.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp399.639.400,00	(Rp96.324.000,00)	(24.10)
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**				Rp495.963.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp495.963.400,00	Rp399.639.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp399.639.400,00	(Rp96.324.000,00)	(24.10)
7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tangerang, Pasar Kemis, Semua Kelurahan/Desa		Rp478.791.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp478.791.400,00	Rp387.135.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp387.135.400,00	(Rp91.656.000,00)	(23.68)
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tangerang, Pasar Kemis, Semua Kelurahan/Desa		Rp17.172.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp17.172.000,00	Rp12.504.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.504.000,00	(Rp4.668.000,00)	(37.33)
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**				Rp143.997.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp143.997.000,00	Rp96.479.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp96.479.000,00	(Rp47.518.000,00)	(49.25)
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**				Rp143.997.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp143.997.000,00	Rp96.479.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp96.479.000,00	(Rp47.518.000,00)	(49.25)
7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp54.033.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp54.033.000,00	Rp38.878.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp38.878.000,00	(Rp15.155.000,00)	(38.98)
7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tangerang, Pasar Kemis, Semua Kelurahan/Desa		Rp26.110.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp26.110.000,00	Rp18.668.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp18.668.000,00	(Rp7.442.000,00)	(39.87)
7	01	06	2.01	0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tangerang, Pasar Kemis, Semua Kelurahan/Desa		Rp15.775.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.775.000,00	Rp8.850.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.850.000,00	(Rp6.925.000,00)	(78.25)
7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tangerang, Pasar Kemis, Semua Kelurahan/Desa		Rp21.897.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp21.897.000,00	Rp10.861.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.861.000,00	(Rp11.036.000,00)	(101.61)
7	01	06	2.01	0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tangerang, Pasar Kemis, Semua Kelurahan/Desa		Rp26.182.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp26.182.000,00	Rp19.222.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp19.222.000,00	(Rp6.960.000,00)	(36.21)

7.01.0.00.0.00.06.0001 - Kelurahan Sindang Sari									Rp2.288.355.800,00	Rp404.775.911,10	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.693.131.711,10	Rp2.208.596.800,00	Rp404.775.911,10	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.613.372.711,10	(Rp79.759.000,00)	(3.05)
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**				Rp2.288.355.800,00	Rp404.775.911,10	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.693.131.711,10	Rp2.208.596.800,00	Rp404.775.911,10	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.613.372.711,10	(Rp79.759.000,00)	(3.05)
7	**01**				**KECAMATAN**				Rp2.288.355.800,00	Rp404.775.911,10	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.693.131.711,10	Rp2.208.596.800,00	Rp404.775.911,10	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.613.372.711,10	(Rp79.759.000,00)	(3.05)
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				Rp1.430.389.700,00	Rp74.896.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.505.285.900,00	Rp1.410.198.700,00	Rp74.896.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.485.094.900,00	(Rp20.191.000,00)	(1.36)
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				Rp98.930.300,00	Rp74.896.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp173.826.500,00	Rp78.739.300,00	Rp74.896.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp153.635.500,00	(Rp20.191.000,00)	(13.14)
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tangerang, Pasar Kemis, Sindangsari		Rp3.400.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.400.000,00	Rp3.400.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.400.000,00	Rp0,00	0.00
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tangerang, Pasar Kemis, Sindangsari		Rp16.137.100,00	Rp74.896.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp91.033.300,00	Rp16.137.100,00	Rp74.896.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp91.033.300,00	Rp0,00	0.00
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tangerang, Pasar Kemis, Sindangsari		Rp12.461.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.461.200,00	Rp12.461.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.461.200,00	Rp0,00	0.00
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tangerang, Pasar Kemis, Sindangsari		Rp25.626.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp25.626.000,00	Rp18.888.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp18.888.000,00	(Rp6.738.000,00)	(35.67)
7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tangerang, Pasar Kemis, Sindangsari		Rp21.700.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp21.700.000,00	Rp18.050.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp18.050.000,00	(Rp3.650.000,00)	(20.22)
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tangerang, Pasar Kemis, Sindangsari		Rp19.606.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp19.606.000,00	Rp9.803.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.803.000,00	(Rp9.803.000,00)	(100.00)
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				Rp1.114.619.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.114.619.400,00	Rp1.114.619.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.114.619.400,00	Rp0,00	0.00
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tangerang, Pasar Kemis, Sindangsari		Rp67.253.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp67.253.400,00	Rp67.253.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp67.253.400,00	Rp0,00	0.00
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tangerang, Pasar Kemis, Sindangsari		Rp1.047.366.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.047.366.000,00	Rp1.047.366.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.047.366.000,00	Rp0,00	0.00
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				Rp216.840.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp216.840.000,00	Rp216.840.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp216.840.000,00	Rp0,00	0.00
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tangerang, Pasar Kemis, Sindangsari		Rp12.930.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.930.000,00	Rp12.930.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.930.000,00	Rp0,00	0.00
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tangerang, Pasar Kemis, Sindangsari		Rp19.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp19.200.000,00	Rp19.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp19.200.000,00	Rp0,00	0.00
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tangerang, Pasar Kemis, Sindangsari		Rp184.710.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp184.710.000,00	Rp184.710.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp184.710.000,00	Rp0,00	0.00
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**				Rp815.746.100,00	Rp329.879.711,10	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.145.625.811,10	Rp766.008.100,00	Rp329.879.711,10	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.095.887.811,10	(Rp49.738.000,00)	(4.54)
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**				Rp815.746.100,00	Rp329.879.711,10	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.145.625.811,10	Rp766.008.100,00	Rp329.879.711,10	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.095.887.811,10	(Rp49.738.000,00)	(4.54)
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan	PENDAPATAN ASLI	Kab. Tangerang,		Rp26.434.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp26.434.000,00	Rp26.434.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp26.434.000,00	Rp0,00	0.00
					Pembangunan di Kelurahan	DAERAH (PAD)	Pasar Kemis, Sindangsari													
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tangerang, Pasar Kemis, Sindangsari		Rp222.442.500,00	Rp329.879.711,10	Rp0,00	Rp0,00	Rp552.322.211,10	Rp222.442.500,00	Rp329.879.711,10	Rp0,00	Rp0,00	Rp552.322.211,10	Rp0,00	0.00
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tangerang, Pasar Kemis, Sindangsari		Rp566.869.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp566.869.600,00	Rp517.131.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp517.131.600,00	(Rp49.738.000,00)	(9.62)
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**				Rp42.220.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp42.220.000,00	Rp32.390.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp32.390.000,00	(Rp9.830.000,00)	(30.35)
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**				Rp42.220.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp42.220.000,00	Rp32.390.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp32.390.000,00	(Rp9.830.000,00)	(30.35)
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tangerang, Pasar Kemis, Sindangsari		Rp42.220.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp42.220.000,00	Rp32.390.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp32.390.000,00	(Rp9.830.000,00)	(30.35)

7.01.0.00.0.00.06.0002 - Kelurahan Kutajaya									Rp2.120.074.928,00	Rp989.162.760,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.109.237.688,00	Rp2.053.129.928,00	Rp989.162.760,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.042.292.688,00	(Rp66.945.000,00)	(2.20)
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**				Rp2.120.074.928,00	Rp989.162.760,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.109.237.688,00	Rp2.053.129.928,00	Rp989.162.760,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.042.292.688,00	(Rp66.945.000,00)	(2.20)
7	**01**				**KECAMATAN**				Rp2.120.074.928,00	Rp989.162.760,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.109.237.688,00	Rp2.053.129.928,00	Rp989.162.760,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.042.292.688,00	(Rp66.945.000,00)	(2.20)
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				Rp1.518.469.228,00	Rp71.990.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.590.459.728,00	Rp1.488.329.228,00	Rp71.990.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.560.319.728,00	(Rp30.140.000,00)	(1.93)
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				Rp160.820.600,00	Rp71.990.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp232.811.100,00	Rp130.680.600,00	Rp71.990.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp202.671.100,00	(Rp30.140.000,00)	(14.87)
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tangerang, Pasar Kemis, Kuta Jaya		Rp9.982.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.982.700,00	Rp9.982.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.982.700,00	Rp0,00	0.00
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tangerang, Pasar Kemis, Kuta Jaya		Rp17.532.000,00	Rp71.990.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp89.522.500,00	Rp17.532.000,00	Rp71.990.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp89.522.500,00	Rp0,00	0.00
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tangerang, Pasar Kemis, Kuta Jaya		Rp39.990.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp39.990.900,00	Rp39.990.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp39.990.900,00	Rp0,00	0.00
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tangerang, Pasar Kemis, Kuta Jaya		Rp25.925.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp25.925.000,00	Rp19.475.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp19.475.000,00	(Rp6.450.000,00)	(33.12)
7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tangerang, Pasar Kemis, Kuta Jaya		Rp39.990.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp39.990.000,00	Rp30.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp30.000.000,00	(Rp9.990.000,00)	(33.30)
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tangerang, Pasar Kemis, Kuta Jaya		Rp27.400.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp27.400.000,00	Rp13.700.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.700.000,00	(Rp13.700.000,00)	(100.00)
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				Rp1.221.218.628,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.221.218.628,00	Rp1.221.218.628,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.221.218.628,00	Rp0,00	0.00
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tangerang, Pasar Kemis, Kuta Jaya		Rp64.982.628,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp64.982.628,00	Rp64.982.628,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp64.982.628,00	Rp0,00	0.00
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tangerang, Pasar Kemis, Kuta Jaya		Rp1.156.236.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.156.236.000,00	Rp1.156.236.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.156.236.000,00	Rp0,00	0.00
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				Rp136.430.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp136.430.000,00	Rp136.430.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp136.430.000,00	Rp0,00	0.00
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tangerang, Pasar Kemis, Kuta Jaya		Rp23.180.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp23.180.000,00	Rp23.180.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp23.180.000,00	Rp0,00	0.00
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tangerang, Pasar Kemis, Kuta Jaya		Rp15.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.000.000,00	Rp15.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.000.000,00	Rp0,00	0.00
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tangerang, Pasar Kemis, Kuta Jaya		Rp98.250.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp98.250.000,00	Rp98.250.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp98.250.000,00	Rp0,00	0.00
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**				Rp558.919.700,00	Rp917.172.260,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.476.091.960,00	Rp530.224.700,00	Rp917.172.260,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.447.396.960,00	(Rp28.695.000,00)	(1.98)
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**				Rp558.919.700,00	Rp917.172.260,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.476.091.960,00	Rp530.224.700,00	Rp917.172.260,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.447.396.960,00	(Rp28.695.000,00)	(1.98)
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tangerang, Pasar Kemis, Kuta Jaya		Rp29.380.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp29.380.000,00	Rp9.115.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.115.000,00	(Rp20.265.000,00)	(222.33)
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tangerang, Pasar Kemis, Kuta Jaya		Rp259.817.700,00	Rp917.172.260,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.176.989.960,00	Rp259.817.700,00	Rp917.172.260,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.176.989.960,00	Rp0,00	0.00
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tangerang, Pasar Kemis, Kuta Jaya		Rp269.722.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp269.722.000,00	Rp261.292.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp261.292.000,00	(Rp8.430.000,00)	(3.23)
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**				Rp42.686.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp42.686.000,00	Rp34.576.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp34.576.000,00	(Rp8.110.000,00)	(23.46)
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**				Rp42.686.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp42.686.000,00	Rp34.576.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp34.576.000,00	(Rp8.110.000,00)	(23.46)
7	01	06	2.01	0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tangerang, Pasar Kemis, Kuta Jaya		Rp42.686.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp42.686.000,00	Rp34.576.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp34.576.000,00	(Rp8.110.000,00)	(23.46)

7.01.0.00.0.00.06.0003 - Kelurahan Kutabaru									Rp1.968.357.300,00	Rp896.802.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.865.160.100,00	Rp1.895.664.300,00	Rp896.802.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.792.467.100,00	(Rp72.693.000,00)	(2.60)
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**				Rp1.968.357.300,00	Rp896.802.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.865.160.100,00	Rp1.895.664.300,00	Rp896.802.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.792.467.100,00	(Rp72.693.000,00)	(2.60)
7	**01**				**KECAMATAN**				Rp1.968.357.300,00	Rp896.802.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.865.160.100,00	Rp1.895.664.300,00	Rp896.802.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.792.467.100,00	(Rp72.693.000,00)	(2.60)
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				Rp1.063.801.500,00	Rp69.481.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.133.283.300,00	Rp1.039.451.500,00	Rp69.481.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.108.933.300,00	(Rp24.350.000,00)	(2.20)
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				Rp105.032.200,00	Rp69.481.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp174.514.000,00	Rp80.682.200,00	Rp69.481.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp150.164.000,00	(Rp24.350.000,00)	(16.22)
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tangerang, Pasar Kemis, Kuta Baru		Rp3.492.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.492.500,00	Rp3.492.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.492.500,00	Rp0,00	0.00
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PENDAPATAN ASLI	Kab. Tangerang,		Rp7.648.000,00	Rp64.976.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp72.624.800,00	Rp7.648.000,00	Rp64.976.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp72.624.800,00	Rp0,00	0.00
						DAERAH (PAD)	Pasar Kemis, Kuta Baru													
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tangerang, Pasar Kemis, Kuta Baru		Rp43.246.700,00	Rp4.505.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp47.751.700,00	Rp43.246.700,00	Rp4.505.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp47.751.700,00	Rp0,00	0.00
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tangerang, Pasar Kemis, Kuta Baru		Rp12.470.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.470.000,00	Rp12.470.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.470.000,00	Rp0,00	0.00
7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tangerang, Pasar Kemis, Kuta Baru		Rp5.400.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.400.000,00	Rp5.400.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.400.000,00	Rp0,00	0.00
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tangerang, Pasar Kemis, Kuta Baru		Rp32.775.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp32.775.000,00	Rp8.425.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.425.000,00	(Rp24.350.000,00)	(289.02)
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				Rp906.776.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp906.776.300,00	Rp906.776.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp906.776.300,00	Rp0,00	0.00
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tangerang, Pasar Kemis, Kuta Baru		Rp47.672.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp47.672.300,00	Rp47.672.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp47.672.300,00	Rp0,00	0.00
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tangerang, Pasar Kemis, Kuta Baru		Rp859.104.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp859.104.000,00	Rp859.104.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp859.104.000,00	Rp0,00	0.00
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				Rp51.993.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp51.993.000,00	Rp51.993.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp51.993.000,00	Rp0,00	0.00
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tangerang, Pasar Kemis, Kuta Baru		Rp19.143.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp19.143.000,00	Rp19.143.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp19.143.000,00	Rp0,00	0.00
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tangerang, Pasar Kemis, Kuta Baru		Rp32.850.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp32.850.000,00	Rp32.850.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp32.850.000,00	Rp0,00	0.00
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**				Rp870.375.800,00	Rp827.321.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.697.696.800,00	Rp829.232.800,00	Rp827.321.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.656.553.800,00	(Rp41.143.000,00)	(2.48)
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**				Rp870.375.800,00	Rp827.321.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.697.696.800,00	Rp829.232.800,00	Rp827.321.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.656.553.800,00	(Rp41.143.000,00)	(2.48)
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tangerang, Pasar Kemis, Kuta Baru		Rp13.525.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.525.000,00	Rp13.525.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.525.000,00	Rp0,00	0.00
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tangerang, Pasar Kemis, Kuta Baru		Rp500.000.000,00	Rp827.321.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.327.321.000,00	Rp500.000.000,00	Rp827.321.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.327.321.000,00	Rp0,00	0.00
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tangerang, Pasar Kemis, Kuta Baru		Rp356.850.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp356.850.800,00	Rp315.707.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp315.707.800,00	(Rp41.143.000,00)	(13.03)
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**				Rp34.180.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp34.180.000,00	Rp26.980.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp26.980.000,00	(Rp7.200.000,00)	(26.69)
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**				Rp34.180.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp34.180.000,00	Rp26.980.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp26.980.000,00	(Rp7.200.000,00)	(26.69)
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tangerang, Pasar Kemis, Kuta Baru		Rp34.180.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp34.180.000,00	Rp26.980.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp26.980.000,00	(Rp7.200.000,00)	(26.69)

7.01.0.00.0.00.06.0004 - Kelurahan Kutabumi									Rp2.073.125.306,00	Rp1.284.729.989,60	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.357.855.295,60	Rp1.993.736.996,00	Rp1.284.729.989,60	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.278.466.985,60	(Rp79.388.310,00)	(2.42)
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**				Rp2.073.125.306,00	Rp1.284.729.989,60	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.357.855.295,60	Rp1.993.736.996,00	Rp1.284.729.989,60	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.278.466.985,60	(Rp79.388.310,00)	(2.42)
7	**01**				**KECAMATAN**				Rp2.073.125.306,00	Rp1.284.729.989,60	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.357.855.295,60	Rp1.993.736.996,00	Rp1.284.729.989,60	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.278.466.985,60	(Rp79.388.310,00)	(2.42)
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				Rp1.488.715.596,00	Rp65.621.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.554.336.996,00	Rp1.466.518.596,00	Rp65.621.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.532.139.996,00	(Rp22.197.000,00)	(1.45)
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				Rp142.952.400,00	Rp65.621.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp208.573.800,00	Rp120.755.400,00	Rp65.621.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp186.376.800,00	(Rp22.197.000,00)	(11.91)
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp8.038.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.038.500,00	Rp8.038.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.038.500,00	Rp0,00	0.00
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tangerang, Pasar Kemis, Kutabumi		Rp9.315.000,00	Rp65.621.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp74.936.400,00	Rp6.210.000,00	Rp65.621.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp71.831.400,00	(Rp3.105.000,00)	(4.32)
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tangerang, Pasar Kemis, Kutabumi		Rp56.845.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp56.845.900,00	Rp56.845.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp56.845.900,00	Rp0,00	0.00
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tangerang, Pasar Kemis, Kutabumi		Rp22.743.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp22.743.000,00	Rp16.986.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.986.000,00	(Rp5.757.000,00)	(33.89)
7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tangerang, Pasar Kemis, Kutabumi		Rp29.800.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp29.800.000,00	Rp24.690.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp24.690.000,00	(Rp5.110.000,00)	(20.70)
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tangerang, Pasar Kemis, Kutabumi		Rp16.210.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.210.000,00	Rp7.985.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.985.000,00	(Rp8.225.000,00)	(103.01)
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				Rp1.236.933.196,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.236.933.196,00	Rp1.236.933.196,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.236.933.196,00	Rp0,00	0.00
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tangerang, Pasar Kemis, Kutabumi		Rp30.867.196,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp30.867.196,00	Rp30.867.196,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp30.867.196,00	Rp0,00	0.00
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tangerang, Pasar Kemis, Kutabumi		Rp1.206.066.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.206.066.000,00	Rp1.206.066.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.206.066.000,00	Rp0,00	0.00
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**				Rp108.830.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp108.830.000,00	Rp108.830.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp108.830.000,00	Rp0,00	0.00
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tangerang, Pasar Kemis, Kutabumi		Rp2.830.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.830.000,00	Rp2.830.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.830.000,00	Rp0,00	0.00
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tangerang, Pasar Kemis, Kutabumi		Rp27.400.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp27.400.000,00	Rp27.400.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp27.400.000,00	Rp0,00	0.00
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tangerang, Pasar Kemis, Kutabumi		Rp78.600.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp78.600.000,00	Rp78.600.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp78.600.000,00	Rp0,00	0.00
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**				Rp467.839.710,00	Rp1.219.108.589,60	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.686.948.299,60	Rp444.883.400,00	Rp1.219.108.589,60	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.663.991.989,60	(Rp22.956.310,00)	(1.38)
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**				Rp467.839.710,00	Rp1.219.108.589,60	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.686.948.299,60	Rp444.883.400,00	Rp1.219.108.589,60	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.663.991.989,60	(Rp22.956.310,00)	(1.38)
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tangerang, Pasar Kemis, Kutabumi		Rp15.411.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.411.000,00	Rp15.411.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.411.000,00	Rp0,00	0.00
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tangerang, Pasar Kemis, Kutabumi		Rp35.000.000,00	Rp1.219.108.589,60	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.254.108.589,60	Rp35.000.000,00	Rp1.219.108.589,60	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.254.108.589,60	Rp0,00	0.00
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tangerang, Pasar Kemis, Kutabumi		Rp417.428.710,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp417.428.710,00	Rp394.472.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp394.472.400,00	(Rp22.956.310,00)	(5.82)
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**				Rp116.570.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp116.570.000,00	Rp82.335.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp82.335.000,00	(Rp34.235.000,00)	(41.58)
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan**				Rp116.570.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp116.570.000,00	Rp82.335.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp82.335.000,00	(Rp34.235.000,00)	(41.58)
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Tangerang, Pasar Kemis, Kutabumi		Rp116.570.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp116.570.000,00	Rp82.335.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp82.335.000,00	(Rp34.235.000,00)	(41.58)

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dengan memperhatikan potensi Kecamatan Pasarkemis dan sesuai dengan tema RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2025, **"Pemerataan Pembangunan Berwawasan Lingkungan Dalam Upaya Peningkatan Daya Saing Daerah Melalui Kolaborasi Antar Sektor"**, maka kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Pasarkemis didesain selaras dengan prioritas pembangunan Kabupaten Tangerang Tahun 2025, yaitu:

1. Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia antara lain
   a. Meningkatkan kualitas pendidikan
      - Pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan
      - Peningkatan kapasitas/kualitas pendidik dan tenaga pendidik
      - Beasiswa MBR
      - Peningkatan minat baca masyarakat
      - Peningkatan perpustakaan keliling
      - Peningkatan bahan bacaan perpustakaan sekolah
      - Peningkatan akses dan kualitas perpustakaan
   b. Meningkatkan kualitas kesehatan
      - Penurunan stunting
      - Pembiayaan jaminan kesehatan
      - Pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan
      - Peningkatan kapasitas/kualitas tenaga kesehatan
      - Penurunan kematian ibu dan bayi
      - Pengendalian penyakit menular dan tidak menular
      - Peningkatan STBM
   c. Menigkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan
      - Peningkatan pemenuhan hak anak
      - Peningkatan perlindungan perempuan dan anak
      - Peningkatan pengarusutamaan gender
   d. Meningkatkan pengendalian penduduk
      - Peningkatan pembangunan keluarga
      - Penurunan angka kelahiran total (TFR)
   e. Meningkatkan daya saing pemuda
      - Pemberdayaan pemuda (ekonomi kreatif)
      - Pembinaan kelompok olahraga prestasi
      - Pelestarian olah raga tradisonal
   f. Mewujudkan lingkungan yang kondusif, Aman dan Tertib
      - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban
      - Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati

2. Meningkatkan perekonomian masyarakat, antara lain
   a. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah Sektor Unggulan.
   b. Meningkatnya Kemandirian Desa.
   c. Meningkatnya Ketahanan Pangan.
   d. Meningkatnya Cakupan Penanganan PPKS.
   e. Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja.

3. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan.

4. Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik fokus pada.
   a. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah
      - Digitalisasi dan integrasi pelayanan publik.
      - Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan publik.
      - Peningkatan nilai Sakip OPD.
      - Peningkatan nilai MCP.
      - Peningkatan kapasitas/pemagangan ASN.
      - Meningkatnya indeks SPBE.

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan Tahun 2025

No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Catatan
	PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase pemenuhana dministrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah KecamatanPasarKemis**	Persen	**100**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran, Monitoring dan evaluasi, serta profil**	Dokumen	**11**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renstra, Renja, Renja Perubahan Efisiensi)	Dokumen	3	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerjaSKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	4	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi KinerjaPerangkat Daerah	Laporan	4	
	Administrasi KeuanganPerangkat Daerah	**Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Laporan	2	
	Penyediaan Gaji danTunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	46	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	2	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Hasil Laporan Barang Daerah**	**Laporan**	**1**	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	4	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Hasil Paket Pakaian Dinas Beserta atribut kelengkapannya**	Paket	1	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	27	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Hasil Laporan Kegiatan Administrasi Perangkat Daerah**	Laporan	7	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	7	

No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Catatan
	Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	8	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	46	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	9	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	Dokumen	3	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	2	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Hasil Laporan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Laporan	**2**	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	14	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	13	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah.**	Laporan	4	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	2	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	20	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	57	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DANPELAYANAN PUBLIK	**Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik di Kecamatan Pasar Kemis**	Persen	Persen	
		Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai denganstandar Kecamatan PasarKemis	Persen	Persen	

No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Catatan
	Penyelenggaraan UrusanPemerintahan yang Tidak Dilaksanakan olehUnit Kerja Perangkat Daerah yang Ada diKecamatan	**Tersedianya laporan peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan**	**Laporan**	1	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	3	
	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	**Tersedianya dokumen koordinasi/ sinergi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan Prasarana pelayanan umum**	Dokumen	**57**	
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikalyang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Dokumen	57	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan di Kecamatan PasarKemis**	Persen	100	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	**Tersedianya Dokumen Laporan Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Desa**	Dokumen	**2**	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga	6	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	2	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Jumlah laporan pemberdayaan**	Laporan	**36**	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	2	
	Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat Kecamatan		Lembaga	**4**	
	Fasilitasi pemanfaatan teknologi tepat guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Laporan	4	

No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Catatan
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti di Kecamatan PasarKemis**	Persen	**100**	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**laporan kegiatan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan**	Laporan	**6**	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,Tentara Nasional Indonesiadan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	6	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti**	Persen	**100**	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Jumlah rekomendasi yang dikeluarkan**	Dokumen	2	
	Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan Undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, pelestarian bhineka tunggal ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan republik indonesia.	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan Undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, pelestarian bhineka tunggal ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan republik indonesia.	Orang	50	
	Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan	Jumlah dokumen Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan	Dokumen	4	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**Prosentase tertib administrasi pemerintahan desa**	Persen	**100**	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**	Laporan	**5**	
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	8	
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	3	
		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Dokumen	7	

No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Catatan
		Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	3	
		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Laporan	6	

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka mendukung prioritas pembangunan daerah tahun 2025 dan pencapaian target tujuan dan sasaran Perangkat Daerah sebagaimana yang ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Pasarkemis Tahun 2024-2026, serta sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dirumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025. Selain itu, juga untuk mendukung pelayanan Perangkat Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan.

Tabel 3. 1 Indikator Kinerja

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
		Out Put	Target	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase pemenuhana dministrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah KecamatanPasarKemis**	100%	20.896.868.474,26
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran, Monitoring dan evaluasi, serta profil**	3 Dokumen	171.698.000,00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renstra, Renja, Renja Perubahan Efisiensi)	3 Dokumen	46.124.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerjaSKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	60.457.000,00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	65.117.000,00
	Administrasi KeuanganPerangkat Daerah	**Jumlah Laporan Keuangan**	2 Dokumen	11.598.779.406,26
	Penyediaan Gaji danTunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	46 Orang/Bulan	11.559.504.526,26
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	2 Laporan	39.274.880,00
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Hasil Laporan Barang Daerah**	1 Laporan	5.231.000,00
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	5.231.000,00
	Administrasi Kepegawaian	**Hasil Paket Pakaian**	1 Laporan	75.640.000,00

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
		Out Put	Target	
	Perangkat Daerah	**Dinas Beserta atribut kelengkapannya**		
	Pengadaan Pakaian Dinasbeserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	27 Paket	75.640.000,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Hasil Laporan Kegiatan Administrasi Perangkat Daerah**	7 Laporan	1.615.620.700,00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	43.633.700,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	802.929.400,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	46 Paket	281.945.600,00
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	9 Paket	157.597.000,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	3 dokumen	28.800.000,00
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Laporan	191.816.000,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	108.899.000,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Hasil Laporan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	2 Dokumen	6.072.199.792,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	14 Laporan	481.624.224,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	5.590.575.568,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah.**	4 Dokumen	1.357.699.576,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinasatau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	71.699.984,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara	20 Unit	420.039.592,00

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
		Out Put	Target	
	Operasional atau Lapangan	dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	57 Unit	204.400.000,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 Unit	661.560.000,00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik di Kecamatan Pasar Kemis**	85 %	16.172.168.193,04
		Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar Kecamatan Pasar Kemis	100 %	34.230.000,00
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan olehUnit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	**Tersedianya laporan peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan**	3 Laporan	34.230.000,00
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3 Laporan	34.230.000,00
	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	**Tersedianya dokumen koordinasi/ sinergi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan Prasarana pelayanan umum**	1 Laporan	16.172.168.193,04
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikalyang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	57 Dokumen	16.172.168.193,04
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan di Kecamatan PasarKemis**	100 %	7.555.419.760,70
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Jumlah laporan pemberdayaan**	**2 Laporan**	1.661.832.000,00
	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan musyawarah di desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	6 Lembaga	87.166.600,00
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan	Jumlah Laporan	2 Laporan	1.574.665.400,00

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
		Out Put	Target	
	Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatn Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan pemberdayaan lembaga Kemasyarakatan	1 Laporan	29.757.200,00
	Fasilitasi pemanfaatan teknologi tepat guna	Jumlah laporan fasilitasi pemanfaatan teknologi tepat guna	4 Laporan	29.757.200,00
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti di Kecamatan Pasarkemis**	100 %	171.592.000,00
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**laporan kegiatan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan**	1 Laporan	171.592.000,00
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	6 Laporan	171.592.000,00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti**	**100 %**	399.639.400,00
	Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah	**Jumlah rekomendasi yang dikeluarkan**	2 Dokumen	399.639.400,00
	Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka menempatkan pengamalan pancasila, pelaksanaan undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945, pelestarian Bhineka Tunggal Ika, serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka menempatkan pengamalan pancasila, pelaksanaan undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945, pelestarian Bhineka Tunggal Ika, serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.	50 Orang	387.135.400,00
	Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan	**J**umlah dokumen Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan	4 Dokumen	12.504.000,00
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**Prosentase tertib administrasi pemerintahan desa**	100 %	131.055.000,00
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**	5 Laporan	131.055.000,00
	Fasilitasi administrasi tata	Jumlah dokumen yang	8 Dokumen	38.878.000,00

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
		Out Put	Target	
	pemerintahan desa	difasilitasi dalam rangka administrasi tata pemerintahan desa		
	Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa.	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	3 Dokumen	18.668.000,00
	Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	7 dokumen	8.850.000,00
	Fasilitasi singkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan Desa	Jumlah dokumen singkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan Desa	3 Dokumen	10.861.000,00
	Koordinasi pendapingan desa di wilayahnya	Jumlah laporan hasil Koordinasi pendapingan desa di wilayahnya	6 Laporan	34.576.000,00

Dalam renja perubahan ini Program/ kegiatan/ sub kegiatan pada tabel diatas tidak mengalami perubahan, hanya saja adanya perubahan anggaran atau refocusing anggaran (efisiensi) karena adanya mandatori langsung dari pemerintah pusat. Adapun anggaran tersebut meliputi perjalanan dinas biasa, dalam kota, paket meeting luar kota dan luar negeri (50%). Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor – bahan cetak (25%). Belanja makana dan minuman rapat (25%). Honorarium narasumber atas pembahas, moderator, pembawa acara, dan panitia (25%). Honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan (50%). Belanja sewa hotel (25%).

BAB IV
PENUTUP

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Pasarkemis Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2025.

Dalam pelaksanaan tahun berjalan Rencana Kerja pada Triwulan 1 dan 2 apabila terdapat ketidaksesuaian dengan hal-hal sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2025, akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian dalam bentuk Perubahan Efisiensi Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4.1 Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Pasarkemis Tahun 2025, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026.

Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang, menetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh unit kerja pada Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk
   - Melaksanakan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya; dan
   - Menjaga konsistensi antara RKPD, Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2025; dan
3. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2025 mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, adapun langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi, efektivitas dan efesiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Tangerang.

4.2 Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Renja Kecamatan Pasarkemis Kabupaten Tangerang Tahun 2025 ini

adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Renja Kecamatan Pasarkemis Kabupaten Tangerang Tahun 2025 untuk setiap triwulannya.

Selanjutnya program dan kegiatan pada Renja Kecamamatan Pasarkemis Kabupaten Tangerang Tahun 2025 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Kecamatan Pasarkemis Kabupaten Tangerang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan stakeholder pembangunan di Kabupaten Tangerang.

Dengan disusunnya Renja Kecamatan Pasarkemis Kabupaten Tangerang Tahun 2025 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Pasarkemis Kabupaten Tangerang pada Tahun Anggaran 2025.

38. Kecamatan Balaraja

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Kecamatan Balaraja Tahun Anggaran 2025 merupakan bagian dari siklus perencanaan pembangunan tahunan yang harus disusun secara sistematis dan adaptif terhadap dinamika pelaksanaan program serta perubahan lingkungan strategis. Hal ini sejalan dengan amanat **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017** tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, serta **Permendagri Nomor 90 Tahun 2019** dan **Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3889 Tahun 2020** tentang klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

Dokumen Renja Perubahan ini disusun untuk menyesuaikan rencana awal dengan perkembangan terbaru yang terjadi baik dari aspek kebutuhan masyarakat, kondisi lapangan, ketersediaan anggaran, maupun penyesuaian atas target dan capaian kinerja organisasi. Berdasarkan dokumen **Perubahan RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2025**, alokasi anggaran Kecamatan Balaraja mengalami perubahan dari sebelumnya sebesar **Rp22.419.038.340,00** menjadi **Rp22.622.417.824,00**. Perubahan ini mencerminkan penyesuaian strategis pada beberapa program prioritas, seperti **penunjang urusan pemerintahan daerah**, **pelayanan publik kecamatan**, **pemberdayaan masyarakat**, hingga **pemeliharaan infrastruktur pelayanan umum**.

Penambahan pagu anggaran juga terjadi pada sejumlah sub kegiatan penting, seperti *Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*, *Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum*, dan *Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*, yang mencerminkan peningkatan kebutuhan operasional maupun penajaman arah kebijakan. Di sisi lain, terdapat pula rasionalisasi belanja pada beberapa sub kegiatan untuk efisiensi dan pergeseran prioritas. Dengan demikian, perubahan Renja ini menjadi alat untuk memastikan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Balaraja tetap sejalan dengan arah pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tangerang.

Melalui dokumen ini, diharapkan proses pembangunan di Kecamatan Balaraja dapat dilaksanakan secara terukur, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta berkontribusi langsung dalam mendukung pencapaian sasaran strategis pembangunan Kabupaten Tangerang Tahun 2025.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Balaraja Tahun Anggaran 2025 antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
8. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RKPD;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Tahun 2021;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 5 Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2019–2023 sebagaimana telah diperpanjang berdasarkan Peraturan Daerah sesuai ketentuan perundang-undangan;
13. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 39 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tangerang Tahun 2025;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Kecamatan Balaraja Tahun 2025 adalah untuk menyediakan acuan strategis dan operasional dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan yang akan dilaksanakan di wilayah Kecamatan Balaraja, sebagai bagian integral dari pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tangerang Tahun 2025.

Tujuan dari penyusunan Renja Perubahan ini adalah:

1. Menyediakan dokumen perencanaan tahunan yang dapat dijadikan pedoman bagi seluruh perangkat Kecamatan dalam menyusun program, kegiatan, dan sub kegiatan yang selaras dengan prioritas pembangunan Kabupaten Tangerang;
2. Mewujudkan sinergi dan keterpaduan antara seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) di tingkat Kecamatan dalam pelaksanaan pembangunan;
3. Menyediakan dasar evaluasi bagi Pemerintah Kabupaten terhadap efektivitas pelaksanaan pembangunan di wilayah Kecamatan Balaraja;
4. Memberikan pedoman bagi Camat dalam mengarahkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta mengoptimalkan kinerja Kecamatan selama Tahun Anggaran 2025.

1.3 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematikan Penulisan

BAB II : EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Balaraja
2.2 Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan

BAB III : PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN BALARAJA KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2025

BAB IV : PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Balaraja

Pencapaian kinerja sasaran Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang Tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. **Meningkatnya Pelayanan Masyarakat**, yang diukur melalui **Indikator Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**.
    - Pada Tahun 2023, target IKM adalah **85**, dengan capaian sebesar **94,85**.
    - Sedangkan pada Tahun 2024, target IKM ditetapkan sebesar **86**, dan realisasi capaian hingga saat ini telah mencapai **88,89**.
    - Dengan demikian, target IKM telah berhasil **melampaui target yang ditetapkan** pada Tahun 2024, menunjukkan adanya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
2. **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan**, yang diukur melalui **Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Balaraja**.
    - Pada Tahun 2023, target Nilai AKIP adalah **76 (predikat BB)**, dengan capaian sebesar **72 (predikat BB)**.
    - Sementara pada Tahun 2024, target Nilai AKIP adalah **79**, dan capaian telah menunjukkan hasil yang **sesuai dengan target** yaitu sebesar **79**.
    - Hal ini mencerminkan adanya **peningkatan efektivitas dan akuntabilitas kinerja instansi**, serta komitmen terhadap perbaikan tata kelola pemerintahan di tingkat kecamatan.

Tabel 2.1
Capaian Kinerja Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang Tahun 2024

Sasaran Kecamatan Balaraja	Indikator	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Keterangan
Meningkatnya pelayanan masyarakat	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	86,00	88,89	Tercapai Diatas target
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan (Nilai AKIP)	Nilai AKIP Kecamatan Balaraja	79	79	Tercapai

2.2 Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan Triwulan I Tahun 2025

Keterkaitan pencapaian kinerja program dan kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, sebagaimana yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) bahwa kegiatan-kegiatan secara umum telah dilaksanakan dengan baik. Adapun evaluasi sampai dengan triwulan I Tahun 2025 dari program, kegiatan, dan sub kegiatan secara rinci sebagai berikut :

Tabel Hasil Evaluasi Program dan Kegiatan Triwulan II Kecamatan Balaraja

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Satuan	Target indikator	Realisasi Indikator	Capaian (%)	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Capaian (%)	Realisasi Fisik Kegiatan (%)
7.01	**KECAMATAN**									
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	%	25	25	100.00 %	10.146.595.792	2.203.792.706	21.72 %	29.92 %
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	Dokumen	2	2	100.00 %	101.212.000	11.510.000	11.37 %	14.66 %
7.01.01.2.01.0001	*Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	Tersedianya Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1	1	100.00 %	48.774.200	5.030.000	10.31 %	10.31 %
7.01.01.2.01.0006	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	Tersedianya Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	1	100.00 %	34.005.000	6.480.000	19.06 %	19.00 %

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Satuan	Target indikator	Realisasi Indikator	Capaian (%)	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Capaian (%)	Realisasi Fisik Kegiatan (%)
7.01.01.2.01.0007	*Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	Tersedianya Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	1	100.00 %	18.432.800	0	0.00 %	0.00 %
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan	Dokumen	-	-	0.00 %	6.432.828.612	1.584.566.831	24.63 %	28.17 %
7.01.01.2.02.0001	*Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	Tersedianya jumlah Dokumen yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Dokumen	3	3	100.00 %	6.398.235.612	1.574.846.831	24.61 %	28.23 %
7.01.01.2.02.0007	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD*	Tersedianya Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	-	-	0.00 %	34.593.000	9.720.000	28.10 %	28.10 %
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pembinaan Pegawai	Dokumen	-	-	0.00 %	16.730.000	0	0.00 %	0.00 %
7.01.01.2.05.0002	*Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya*	Tersedianya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	6	6	100.00 %	16.730.000	0	0.00 %	0.00 %
7.01.01.2.05.0011	*Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*	Tersedianya Jumlah Dokumen Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Dokumen	-	-	0.00 %	0	0	0.00 %	0.00 %
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen	2	2	100.00 %	732.172.600	228.803.000	31.25 %	47.52 %

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Satuan	Target indikator	Realisasi Indikator	Capaian (%)	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Capaian (%)	Realisasi Fisik Kegiatan (%)
		Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen	1	1	100.00 %				
7.01.01.2.06.0001	*Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	-	-	0.00 %	30.988.500	0	0.00 %	0.00 %
7.01.01.2.06.0002	*Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket	1	1	100.00 %	282.536.300	49.600.000	17.56 %	17.57 %
7.01.01.2.06.0003	*Penyediaan Peralatan Rumah Tangga*	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga Yang Disediakan	Paket	1	1	100.00 %	49.603.600	0	0.00 %	0.00 %
7.01.01.2.06.0004	*Penyediaan Bahan Logistik Kantor*	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100.00 %	141.322.200	129.838.000	91.87 %	75.00 %
7.01.01.2.06.0005	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	100.00 %	49.141.000	27.418.000	55.79 %	75.00 %
7.01.01.2.06.0008	*Fasilitasi Kunjungan Tamu*	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	1	100.00 %	130.950.000	21.947.000	16.76 %	22.50 %
7.01.01.2.06.0009	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	1	100.00 %	47.631.000	0	0.00 %	0.00 %
7.01.01.2.06.0002	*Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediaka	Dokumen	1	1	100.00 %	164.963.300	0	0.00 %	0.00 %
7.01.01.2.06.0004	*Penyediaan Bahan Logistik Kantor*	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Dokumen	1	1	100.00 %	67.765.300	67.396.000	99.46 %	99.00 %

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Satuan	Target indikator	Realisasi Indikator	Capaian (%)	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Capaian (%)	Realisasi Fisik Kegiatan (%)
7.01.01.2.06.0005	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Dokumen	1	1	100.00 %	6.269.000	0	0.00 %	0.00 %
7.01.01.2.06.0008	*Fasilitasi Kunjungan Tamu*	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dokumen	1	1	100.00 %	36.000.000	4.760.000	13.22 %	13.00 %
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Laporan Jasa Penunjang	Laporan	3	3	100.00 %	1.994.544.968	355.062.875	17.80 %	26.49 %
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	1	1	100.00 %				
7.01.01.2.08.0001	*Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	Tersedianya Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1	100.00 %	9.972.000	2.493.000	25.00 %	25.00 %
7.01.01.2.08.0002	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4	4	100.00 %	374.754.400	70.916.375	18.92 %	26.45 %
7.01.01.2.08.0004	*Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	4	100.00 %	1.609.818.568	281.653.500	17.50 %	28.02 %
7.01.01.2.08.0002	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Dokumen	2	2	100.00 %	68.725.100	9.636.000	14.02 %	14.00 %
7.01.01.2.08.0004	*Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Dokumen	3	3	100.00 %	366.987.000	83.857.500	22.85 %	22.00 %

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Satuan	Target indikator	Realisasi Indikator	Capaian (%)	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Capaian (%)	Realisasi Fisik Kegiatan (%)
		Kantor yang Disediakan								
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah\ Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	3	3	100.00 %	869.107.612	23.850.000	2.74 %	16.89 %
7.01.01.2.09.0001	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan*	Tersedianya Jumlah Dokumen Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Dokumen	3	3	100.00 %	160.637.628	15.560.000	9.69 %	21.97 %
7.01.01.2.09.0002	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	Tersedianya Jumlah Dokumen Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Dokumen	3	3	100.00 %	152.319.084	8.290.000	5.44 %	11.81 %
7.01.01.2.09.0006	*Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	Tersedianya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	7	7	100.00 %	71.500.000	0	0.00 %	0.00 %
7.01.01.2.09.0009	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*	Tersedianya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	-	-	0.00 %	484.650.900	0	0.00 %	0.00 %
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARA	Persentase pemenuhan PATEN	%	25	25	100.00 %	7.714.034.648	1.243.736.000	16.12 %	18.61 %

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Satuan	Target indikator	Realisasi Indikator	Capaian (%)	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Capaian (%)	Realisasi Fisik Kegiatan (%)
	AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	sesuai dengan standar								
		Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara	%	16.25	16.25	100.00 %				
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah laporan pelayanan	Laporan	1	1	100.00 %	61.398.200	12.930.000	21.06 %	21.21 %
7.01.02.2.02.0003	*Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	Tersedianya Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	1	1	100.00 %	61.398.200	12.930.000	21.06 %	21.21 %
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah dokumen pemeliharaan	Dokumen	13	13	100.00 %	7.652.636.448	1.230.806.000	16.08 %	16.00 %
7.01.02.2.03.0001	*Koordinasi /Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum*	Tersedianya Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Dokumen	15	15	100.00 %	7.652.636.448	1.230.806.000	16.08 %	16.00 %

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Satuan	Target indikator	Realisasi Indikator	Capaian (%)	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Capaian (%)	Realisasi Fisik Kegiatan (%)
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	%	25	25	100.00 %	3.569.570.400	1.120.466.500	31.39 %	56.17 %
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Pemberdayaan	Laporan	21	21	100.00 %	1.328.705.000	640.137.000	48.18 %	73.37 %
7.01.03.2.01.0001	*Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa*	Tersedianya Jumlah Dokumen Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Dokumen	2	2	100.00 %	81.087.000	80.807.000	99.65 %	100.00 %
7.01.03.2.01.0003	*Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	Tersedianya Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	18	18	100.00 %	1.247.618.000	559.330.000	44.83 %	46.73 %
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Dokumen	20	20	100.00 %	2.240.865.400	480.329.500	21.44 %	21.77 %
		Jumlah Dokumen lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	Dokumen	20	20	100.00 %				
7.01.03.2.02.0003	*Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*	Jumlah dokumen lembaga masyarakat yang mendapat	Dokumen	20	20	100.00 %	2.240.865.400	480.329.500	21.44 %	21.77 %

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Satuan	Target indikator	Realisasi Indikator	Capaian (%)	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Capaian (%)	Realisasi Fisik Kegiatan (%)
		pembinaan/pemberdayaan								
7.01.03.2.02.0001	*Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan*	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Dokumen	4	4	100.00 %	12.429.000	7.620.000	61.31 %	61.00 %
7.01.03.2.02.0002	*Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan*	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Dokumen	3	3	100.00 %	171.361.000	46.617.500	27.20 %	27.00 %
7.01.03.2.02.0003	*Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*	Jumlah Dokumen lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	Dokumen	15	15	100.00 %	2.057.075.400	426.092.000	20.71 %	20.00 %
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	%	25	25	100.00 %	162.346.700	38.180.000	23.52 %	30.40 %
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan gangguan trantibum	Laporan	4	4	100.00 %	162.346.700	38.180.000	23.52 %	30.40 %
		Jumlah gangguan yang ditindaklanjuti	Dokumen	1	1	100.00 %				
7.01.04.2.01.0001	*Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi*	Tersedianya Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan	Laporan	4	4	100.00 %	162.346.700	38.180.000	23.52 %	30.40 %

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Satuan	Target indikator	Realisasi Indikator	Capaian (%)	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Capaian (%)	Realisasi Fisik Kegiatan (%)
	Vertikal di Wilayah Kecamatan	Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan								
7.01.04.2.01.0001	*Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan*	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Dokumen	-	-	0.00 %	56.792.700	7.368.000	12.97 %	12.00 %
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	%	25	25	100.00 %	222.740.600	13.130.000	5.89 %	34.92 %
		Persentase tertib administrasi pemerintahan desa	%	22	22	100.00 %				
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen rekomendasi yang dikeluarkan	Dokumen	2	2	100.00 %	222.740.600	13.130.000	5.89 %	34.92 %
7.01.05.2.01.0001	*Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,*	Jumlah Dokumen Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka	Dokumen	-	-	0.00 %	185.140.600	0	0.00 %	0.00 %

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Satuan	Target indikator	Realisasi Indikator	Capaian (%)	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Capaian (%)	Realisasi Fisik Kegiatan (%)
	Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara	Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia								
7.01.05.2.01.0008	*Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan*	Tersedianya Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	1	1	100.00 %	37.600.000	13.130.000	34.92 %	34.92 %
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa	%	25	25	100.00 %	120.594.200	4.810.000	3.99 %	61.08 %
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Laporan	4	4	100.00 %	120.594.200	4.810.000	3.99 %	61.08 %
7.01.06.2.01.0002	*Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa*	Tersedianya Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	1	1	100.00 %	66.115.200	0	0.00 %	0.00 %
7.01.06.2.01.0009	*Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa*	Tersedianya Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	1	1	100.00 %	7.875.000	4.810.000	61.08 %	61.08 %
7.01.06.2.01.0017	*Koordinasi Pendampingan*	Tersedianya Jumlah Laporan Hasil Koordinasi	Laporan	1	1	100.00 %	46.604.000	0	0.00 %	0.00 %

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Satuan	Target indikator	Realisasi Indikator	Capaian (%)	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Capaian (%)	Realisasi Fisik Kegiatan (%)
	Desa di Wilayahnya	Pendampingan Desa di Wilayahnya								

BAB III
PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN BALARAJA KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2025

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang Tahun 2025 disusun sebagai bentuk penyesuaian terhadap kebutuhan prioritas pembangunan daerah yang berkembang dinamis. Dokumen ini menjabarkan arah kebijakan, program, dan kegiatan yang bertujuan untuk mencapai sasaran dan tujuan sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Kecamatan Balaraja, sekaligus menjadi **alat evaluasi** atas capaian program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya, **panduan operasional** bagi pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan, serta **acuan perencanaan** bagi penyusunan program dan kegiatan pada tahun berikutnya.

Pada Tahun 2025, Kecamatan Balaraja melaksanakan **6 (enam) program utama**, **12 kegiatan**, dan **30 sub kegiatan**. Seluruh program dan kegiatan tersebut mengacu pada **nomenklatur resmi** yang diatur dalam **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019** tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Daerah, yang kemudian telah **dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023** tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021.

Adapun program-program utama yang tercantum dalam perubahan Renja Kecamatan Balaraja Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**
2. **Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**
3. **Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**
4. **Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**
5. **Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**
6. **Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**

Keenam program tersebut akan dianalisis lebih lanjut berdasarkan capaian, permasalahan pelaksanaan, serta strategi yang akan ditempuh guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program di Kecamatan Balaraja. Perubahan rencana kerja ini diharapkan menjadi dasar yang kuat dalam penyelarasan pembangunan di tingkat kecamatan agar tetap sejalan dengan target dan prioritas Pemerintah Kabupaten Tangerang Tahun 2025.

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					
			TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	
	KECAMATAN BALARAJA				**15.358.529.118,00**	**22.419.038.340,00**	**22.622.417.824,00**	**7.263.888.706,00**
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**15.358.529.118,00**	**22.419.038.340,00**	**22.622.417.824,00**	**7.263.888.706,00**
7.01	**KECAMATAN**				**15.358.529.118,00**	**22.419.038.340,00**	**22.622.417.824,00**	**7.263.888.706,00**
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan**	**100 Persen**	**100 Persen**	**9.673.865.618,00**	**10.299.339.392,00**	**10.763.131.276,00**	**1.193.543.500,00**
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan*	100 Persen	100 Persen	140.000.000,00	138.056.000,00	101.212.000,00	-38.788.000,00
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen	80.000.000,00	79.042.000,00	48.774.200,00	-31.225.800,00
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	35.000.000,00	34.900.000,00	34.005.000,00	-995.000,00
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00	24.114.000,00	18.432.800,00	-6.567.200,00
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah laporan keuangan*	1 Dokumen	1 Dokumen	5.937.409.118,00	6.444.580.612,00	6.748.764.096,00	811.354.978,00
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					
			TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	12 Orang/bulan	5.892.409.118,00	6.398.235.612,00	6.714.171.096,00	821.761.978,00
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD							
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	1 Laporan	45.000.000,00	46.345.000,00	34.593.000,00	-10.407.000,00
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Pembinaan Pegawai*	1 Dokumen	1 Dokumen	23.000.000,00	16.730.000,00	16.730.000,00	-6.270.000,00
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya							
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	23 Paket	23 Paket	23.000.000,00	16.730.000,00	16.730.000,00	-6.270.000,00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	1 Dokumen	1 Dokumen	792.771.800,00	828.840.200,00	957.172.600,00	164.400.800,00
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	25.000.000,00	30.988.500,00	30.988.500,00	5.988.500,00
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	120.000.000,00	117.573.000,00	342.573.000,00	222.573.000,00
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					
			TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100.000.000,00	49.603.600,00	49.603.600,00	-50.396.400,00
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	75.000.000,00	73.556.900,00	73.556.900,00	-1.443.100,00
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	50.000.000,00	51.952.000,00	42.872.000,00	-7.128.000,00
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu							
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	4 Laporan	120.000.000,00	120.000.000,00	94.950.000,00	-25.050.000,00
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	2 Laporan	80.000.000,00	96.005.000,00	47.631.000,00	-32.369.000,00
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Laporan Jasa Penunjang*	1 Dokumen	1 Dokumen	1.965.684.700,00	2.002.024.968,00	2.070.144.968,00	104.460.268,00
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	9.972.000,00	9.972.000,00	-28.000,00
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	300.000.000,00	306.029.300,00	306.029.300,00	6.029.300,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					
			TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1.196.938.000,00	1.242.831.568,00	1.318.431.568,00	121.493.568,00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	1 Dokumen	1 Dokumen	815.000.000,00	869.107.612,00	869.107.612,00	54.107.612,00
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit	4 Unit	155.000.000,00	160.637.628,00	160.637.628,00	5.637.628,00
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	2 Unit	100.000.000,00	152.319.084,00	152.319.084,00	52.319.084,00
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	5 Unit	60.000.000,00	71.500.000,00	71.500.000,00	11.500.000,00
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	4 Unit	500.000.000,00	484.650.900,00	484.650.900,00	-15.349.100,00
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN**	**Persentase pemeliharaan**	**100 Persen**	**100 Persen**	**1.630.062.000,00**	**7.740.250.048,00**	**7.784.034.648,00**	**976.838.000,00**

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					
			TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	
	PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Fasilitas Umum yang terpelihara**						
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Jumlah laporan pelayanan*	1 Dokumen	1 Dokumen	80.000.000,00	79.531.600,00	61.398.200,00	-18.601.800,00
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan							
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	80.000.000,00	79.531.600,00	61.398.200,00	-18.601.800,00
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	*Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara*	100 Persen	100 Persen	1.550.062.000,00	7.660.718.448,00	7.722.636.448,00	6.172.574.448,00
7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum							
		Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	1 Dokumen	1 Dokumen	1.550.062.000,00	7.660.718.448,00	7.722.636.448,00	6.172.574.448,00
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan**	**100 Persen**	**100 Persen**	**3.386.353.800,00**	**3.760.403.800,00**	**3.569.570.400,00**	**-1.136.353.800,00**
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Jumlah Laporan Pemberdayaan*	2 Dokumen	2 Dokumen	1.080.000.000,00	1.455.723.800,00	1.328.705.000,00	248.705.000,00
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa							

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					
			TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10 Lembaga Kemasyarakatan	10 Lembaga Kemasyarakatan	80.000.000,00	81.087.000,00	81.087.000,00	1.087.000,00
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan							
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	4 Laporan	1.000.000.000,00	1.374.636.800,00	1.247.618.000,00	247.618.000,00
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti**	**100 Persen**	**100 Persen**	**258.247.700,00**	**210.979.700,00**	**162.346.700,00**	**11.752.300,00**
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*jumlah laporan gangguan trantibum*	1 Laporan	1 Laporan	258.247.700,00	210.979.700,00	162.346.700,00	-95.901.000,00
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan							
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	180.000.000,00	132.732.000,00	105.554.000,00	-74.446.000,00
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti**	**100 Persen**	**100 Persen**	**280.000.000,00**	**259.443.400,00**	**222.740.600,00**	**30.000.000,00**
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai	*Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti*	1 Dokumen	1 Dokumen	280.000.000,00	259.443.400,00	222.740.600,00	-57.259.400,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					
			TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	
	Penugasan Kepala Daerah							
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia							
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	50 Orang	50 Orang	200.000.000,00	209.143.400,00	185.140.600,00	-14.859.400,00
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan							
		Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen	80.000.000,00	50.300.000,00	37.600.000,00	-42.400.000,00
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase tertib administrasi pemerintahan desa**	**88 Persen**	**88 Persen**	**130.000.000,00**	**148.622.000,00**	**120.594.200,00**	**20.000.000,00**
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Persentase tertib administrasi pemerintahan desa*	1 Dokumen	1 Dokumen	130.000.000,00	148.622.000,00	120.594.200,00	-9.405.800,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					
			TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa							
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	77.840.000,00	66.115.200,00	16.115.200,00
7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa							
		Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	35.000.000,00	10.510.000,00	7.875.000,00	-27.125.000,00
7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya							
		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	1 Laporan	1 Laporan	45.000.000,00	60.272.000,00	46.604.000,00	1.604.000,00
	KELURAHAN BALARAJA				**15.358.529.118,00**	**22.419.038.340,00**	**22.622.417.824,00**	**7.263.888.706,00**
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**15.358.529.118,00**	**22.419.038.340,00**	**22.622.417.824,00**	**7.263.888.706,00**
7.01	**KECAMATAN**				**15.358.529.118,00**	**22.419.038.340,00**	**22.622.417.824,00**	**7.263.888.706,00**
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan**	**100 Persen**	**100 Persen**	**9.673.865.618,00**	**10.299.339.392,00**	**10.763.131.276,00**	**1.193.543.500,00**
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	1 Dokumen	1 Dokumen	792.771.800,00	828.840.200,00	957.172.600,00	164.400.800,00
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	129.882.800,00	164.963.300,00	164.963.300,00	35.080.500,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					
			TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	35.976.400,00	67.765.300,00	67.765.300,00	31.788.900,00
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	8.432.600,00	8.432.600,00	6.269.000,00	-2.163.600,00
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu							
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Laporan	2 Laporan	48.480.000,00	48.000.000,00	36.000.000,00	-12.480.000,00
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Laporan Jasa Penunjang*	1 Dokumen	1 Dokumen	1.965.684.700,00	2.002.024.968,00	2.070.144.968,00	104.460.268,00
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	84.274.700,00	68.725.100,00	68.725.100,00	-15.549.600,00
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	374.472.000,00	374.467.000,00	366.987.000,00	-7.485.000,00
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**	**-**	**-**	**1.630.062.000,00**	**7.740.250.048,00**	**7.784.034.648,00**	**976.838.000,00**
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat	-	-	-	80.000.000,00	79.531.600,00	61.398.200,00	-18.601.800,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					
			TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	
	Daerah yang Ada di Kecamatan							
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan							
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan**	**100 Persen**	**100 Persen**	**3.386.353.800,00**	**3.760.403.800,00**	**3.569.570.400,00**	**-1.136.353.800,00**
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan*	2 Dokumen	2 Dokumen	2.306.353.800,00	2.304.680.000,00	2.240.865.400,00	-65.488.400,00
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan							
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	12.429.000,00	12.429.000,00	12.429.000,00	0,00
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan							
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	3 Unit	201.369.600,00	183.297.000,00	171.361.000,00	-30.008.600,00
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan							
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	2.092.555.200,00	2.108.954.000,00	2.057.075.400,00	-35.479.800,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					
			TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	
		Masyarakat di Kelurahan						
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti**	**100 Persen**	**100 Persen**	**258.247.700,00**	**210.979.700,00**	**162.346.700,00**	**11.752.300,00**
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah gangguan yang ditindaklanjuti*	1 Laporan	1 Laporan	258.247.700,00	210.979.700,00	162.346.700,00	-95.901.000,00
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan							
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	78.247.700,00	78.247.700,00	56.792.700,00	-21.455.000,00
J U M L A H					**15.358.529.118,00**	**22.419.038.340,00**	**22.622.417.824,00**	**1.284.717.462.164,00**

BAB V
PENUTUP

5.1 Prakata

Dokumen **Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang Tahun 2025** ini merupakan hasil dari proses perencanaan yang adaptif, partisipatif, dan responsif terhadap dinamika pembangunan serta kebutuhan riil masyarakat di wilayah Kecamatan Balaraja. Penyusunan dokumen ini mengacu pada hasil evaluasi capaian kinerja sebelumnya, serta menyesuaikan dengan kebijakan dan prioritas pembangunan yang tertuang dalam dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2025.

Sebagai dokumen perencanaan teknis operasional tahunan, Renja Perubahan ini memuat penjabaran arah kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan yang menjadi acuan seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan di Kecamatan Balaraja. Dokumen ini tidak hanya menjadi alat koordinasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan, tetapi juga menjadi bagian penting dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Keberhasilan implementasi Renja Perubahan Tahun 2025 sangat bergantung pada sinergi seluruh unsur pelaksana, komitmen aparatur, serta dukungan aktif dari masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Oleh karena itu, besar harapan kami bahwa dokumen ini dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Balaraja dalam mendukung terwujudnya pembangunan daerah yang berkelanjutan, merata, dan berkeadilan sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tangerang.

Semoga dokumen ini memberikan manfaat nyata dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Balaraja serta menjadi referensi yang berguna dalam proses evaluasi dan perbaikan berkelanjutan pada masa yang akan datang.

39. Kecamatan Kresek

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Kecamatan Kresek Tahun 2025 ini disusun mengacu kepada visi, misi, arah kebijakan umum, strategi, prioritas, program dan kegiatan pembangunan Tahun 2025 Kabupaten Tangerang, yang tertuang pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 Kabupaten Tangerang.

Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang, sebagai salah satu unit pemerintahan di tingkat kecamatan, menghadapi tantangan yang semakin kompleks seiring dengan perkembangan zaman dan tuntutan masyarakat akan pelayanan publik yang lebih baik. Dalam rangka menjawab tantangan tersebut, diperlukan adanya perubahan dan penyesuaian dalam Rencana Kerja Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang. Rencana kerja perubahan ini disusun sebagai langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan, yang didukung oleh penambahan anggaran pada beberapa sektor kunci.

Perubahan regulasi di tingkat pusat dan daerah, khususnya terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, menjadi salah satu faktor pendorong utama dalam penyusunan rencana kerja perubahan ini. Adanya Kebijakan Pemerintah Pusat dalam kenaikan gaji Aparatur Sipil Negara baik ditingkat Pusat dan Daerah, serta regulasi terkait lainnya, mengharuskan Kecamatan Kresek untuk melakukan penyesuaian agar selaras dengan ketentuan yang berlaku. Sejalan dengan hal tersebut, terdapat peningkatan alokasi anggaran untuk gaji dan tunjangan aparatur sipil negara, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kinerja pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Dinamika perkembangan wilayah dan pertumbuhan penduduk di Kecamatan Kresek juga menjadi pertimbangan dalam perencanaan perubahan ini. Peningkatan jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi di wilayah Kecamatan Kresek menuntut adanya peningkatan kapasitas pelayanan dan pengelolaan administrasi yang lebih efektif. Oleh karena itu, Kecamatan Kresek perlu mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang semakin beragam. Untuk mendukung hal ini, terdapat penambahan anggaran signifikan pada sektor pembangunan, yang akan difokuskan pada perbaikan infrastruktur dan fasilitas publik di wilayah kecamatan.

Upaya untuk meningkatkan koordinasi dan sinergi antar unit kerja di lingkungan Kecamatan Kresek juga menjadi latar belakang penting dalam penyusunan rencana kerja perubahan ini. Dengan mempertimbangkan analisis beban kerja dan optimalisasi fungsi masing-masing unit, diharapkan dapat tercipta struktur organisasi yang bekerja secara optimal dalam melayani masyarakat. Selain itu, terdapat penambahan anggaran untuk beberapa kegiatan strategis, seperti program pemberdayaan masyarakat dalam memfasilitasi UMKM, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan penguatan fungsi koordinasi antar desa di wilayah Kecamatan Kresek. Rencana kerja perubahan ini akan menjadi pedoman bagi Kecamatan Kresek dalam melaksanakan transformasi organisasi menuju tata kelola pemerintahan yang lebih baik di tahun 2025, dengan dukungan anggaran yang lebih memadai untuk mewujudkan visi dan misi kecamatan.

1.2 LANDASAN HUKUM

a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmoniasi Peraturan Perpajakan;
b. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tamgbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
d. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
h. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang;
i. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 33 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan;
j. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah;
k. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 75 Tahun 2023 tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2024-2026.
l. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 20 tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2025

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2025 disusun untuk mewujudkan target kinerja tahun 2025 dengan mengalokasikan sumber daya yang dimiliki, serta untuk mengetahui penjabaran perencanaan pembangunan Kabupaten Tangerang khususnya Kecamatan Kresek selama 1 (satu) tahun anggaran yang dituangkan dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah.

Adapun penjabaran perencanaan pembangunan dalam Renja Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang Tahun 2025 meliputi:

1. Program dan kegiatan Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang Tahun 2025;
2. Lokasi pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang Tahun 2025;
3. Indikator Kinerja Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang Tahun 2025;
4. Kelompok sasaran Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang Tahun 2025; dan

5. Perubahan Pagu program dan kegiatan Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2025.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

1. Merencanakan program dan kegiatan Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang Tahun 2025;
2. Mengevaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang Tahun berjalan;
3. Mengetahui masalah, tantangan dan Solusi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang Tahun berjalan;
4. Menyediakan arahan/pedoman bagi aparatur Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang dalam Menyusun Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Kecamatan Kresek Tahun Anggaran 2025;
5. Menjadi alat ukur kinerja penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sebagaimana telah dirumuskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dokumen Perubahan Rencana Kerja Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2025 disusun dengan Sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024
BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB IV : PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Kresek

Pencapaian Kinerja sasaran Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang Tahun 2025 adalah :

1. **Meningkatnya Pelayanan Masyarakat** yang diukur dengan Indikator "**Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat**". Pada tahun 2024 target Indeks Kepuasan Masyarakat 91.08 dan Capaian Sebesar 91.08. Dengan demikian target **tercapai** di tahun 2024 dan masih berjalan untuk penilaian di tahun 2025;
2. **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan** yang diukur dengan Indikator "**Nilai AKIP Kecamatan Kresek**". Pada tahun 2024 target Nilai AKIP 80.10 dan Capaian Sebesar 75.40. Dengan demikian target **belum tercapai** di tahun 2024 hal ini disebabkan karena penyesuaian dalam penilaian, oleh karena itu akan dimaksimalkan di tahun 2025.
3. **Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum** yang diukur dengan Indikator "**Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum**". Pada tahun 2023 target Penurunan sebesar 71.40% dan Capaian Sebesar 62%. Dengan demikian target **tercapai** di tahun 2023 dan indikator sudah tidak ada di tahun 2024 dikarenakan penyesuaian sesuai dengan RPD Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026.

Tabel 2.1
Capaian Kinerja Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang Tahun 2024

Sasaran Kecamatan Kresek	Indikator	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Keterangan
Meningkatnya pelayanan masyarakat	Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat	91.08	91.08	Tercapai
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan (Nilai AKIP)	Nilai AKIP Kecamatan Kresek	80.10	75.40	Belum Tercapai
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	71.40	62	Tercapai

Terhadap saasaran program Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang Tahun 2025 memiliki 6 Program. Adapun program yang dan sasaran dimaksud adalah :

Tabel 2.2
Program, Target, dan Realisasi Tahun 2024 dan Triwulan II Tahun 2025

Program	Indikator	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Target Tahun 2025	Realisasi Triwulan II Tahun 2025
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	100 Prosen	100 Prosen	100 Prosen	
Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar dan Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara	89 Prosen	89 Prosen	89.25 Prosen	
Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	88 Prosen	88 Prosen	90 Prosen	
Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase laporan trantibum yang di fasilitasi	75 Prosen	75 Prosen	100 Prosen	
Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa dengan laporan keuangan dan administrasi baik	82.26 Prosen	82.26 Prosen	84.50 Prosen	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Prosentase Program Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum	0	0	75 Prosen	

Tabel 2.3
Target, Realisasi Anggaran, Realisasi Kinerja sd Triwulan II Tahun 2025

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran		Kinerja	
		Pagu	Realisasi	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	8.218.123.229	3.769.413.111	100%	45,87 %
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Hasil : Persentase Ketersediaan Dokumen perencanaan dan Pelaporan	251.212.920	55.299.250	100%	22,01%
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	81.443.720	15.330.000	2	2
Sub Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil	108.009.200	26.098.000	1	1

Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				
Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	61.760.000	13.871.250	3	3
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Hasil : Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.836.754.581	2.520.354.784	100%	43,18%
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	5.760.683.581	2.480.312.284	23	23
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	76.071.000	40.042.500	6	6
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase aparatur yang meningkat kapasitasnya	127.845.000	54.894.000	100%	42,94%
Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	72.094.000	54.894.000	24	24
Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	55.751.000	0.00	50	0
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Hasil : Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	492.703.400	291.882.100	100%	59,24%
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	30.734.500	0.00	1	0
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	210.195.400	151.811.600	6	6

Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	63.068.500	58.788.500	8	8
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	20.707.000	15.792.000	2	2
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	60.000.000	29.000.000	1	1
Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	59.220.000	21.135.000	6	6
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48.778.000	15.355.000	6	6
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Hasil : Persentase pemenuhan Jasa Penunjang	1.059.542.968	502.864.797	100%	47,46%
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.514.000	1.514.000	6	6
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	303.275.400	93.516.977	12	12
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayamam Umum Kantor	754.753.568	407.833.820	6	6
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Hasil : Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	450.064.360	344.118.180	100%	76,46%
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	107.451.176	53.341.188	2	2
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang	69.613.184	35.172.992	1	1

Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	33.000.000	16.800.000	20	20
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	240.000.000	238.804.000	1	1
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase laporan trantibum yang di fasilitasi	69.113.000	36.371.000	100%	52,63%
Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Hasil : Persentase laporan trantibum yang di fasilitasi	69.113.000	36.371.000	100%	52,63%
Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	69.113.000	36.371.000	4	4
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa dengan laporan keuangan dan administrasi baik	74.912.000	48.444.000	84.50%	64,67%
Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Hasil : Persentase desa dengan laporan keuangan dan administrasi baik	74.912.000	48.444.000	84.50%	64,67%
Sub Kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	74.912.000	48.444.000	4	4
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	1.657.695.800	1.014.945.000	100%	61,23%

Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Hasil : Persentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	1.643.471.000	1.014.945.000	100%	61,76%
Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1.576.308.000	947.782.000	6	6
Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	67.163.000	67.163.000	6	6
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar dan Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara	5.852.617.023	3.217.296.000	89.25%	54,97%
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Hasil : Persentase terpenuhinya paten sesuai dengan standart	17.920.000	12.000.000	66,96%	13.09%
Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	17.920.000	12.000.000	1	1
Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Hasil : Persentase infrastruktur dasar yang terpelihara	5.834.697.023	3.205.296.000	89.25%	54,94%
Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan	Jumlah dokumen koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum	5.834.697.023	3.205.296.000	2	2

Prasarana Pelayanan Umum					
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Prosentase Program Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum	290.030.800	22.832.000	75%	7,87%
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Hasil : Persentase Orang yang mengikuti pembinaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	290.030.800	22.832.000	75%	7,87%
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	199.452.800	-	12	0
Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	34.573.000	12.466.000	24	24
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	56.005.000	10.366.000	4	4
Jumlah Belanja Daerah		16.162.491.852	8.109.301.111		

2.2 Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan

Keterkaitan pencapaian kinerja program dan kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, sebagaimana yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) bahwa kegiatan-kegiatan secara umum telah dilaksanakan dengan baik. Adapun evaluasi sampai dengan triwulan II Tahun 2025 dari program, kegiatan, dan sub kegiatan secara rinci sebagai berikut :

Tabel 2.3
Target, Realisasi Anggaran, Realisasi Kinerja sd Triwulan I Tahun 2025

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran		Kinerja	
		Pagu	Realisasi	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	8.218.123.229	1.809.531.197	100%	21.53%
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Hasil : Persentase Ketersediaan Dokumen perencanaan dan Pelaporan	251.212.920	0	100%	00.00%
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	81.443.720	0	1	0
Sub Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	108.009.200	0,00	0	0
Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	61.760.000	0.00	1	0
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Hasil : Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.836.754.581	1.276.825.898	100%	21.78%
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	5.760.683.581	1.273.547.898	23	23
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi	76.071.000	3.278.000	3	3

Triwulanan/ Semesteran SKPD	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase aparatur yang meningkat kapasitasnya	127.845.000	54.894.000	100%	38.57%
Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	72.094.000	54.894.000	12	12
Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	55.751.000	0.00	50	0
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Hasil : Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	492.703.400	105.503.500	100%	19.10%
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	30.734.500	0.00	1	0
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	210.195.400	56.200.000	2	2
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	63.068.500	42.973.500	4	4
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	20.707.000	0.00	1	0
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	60.000.000	0.00	0	0
Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	59.220.000	6.330.000	3	3
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48.778.000	0.00	3	0

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Hasil : Persentase pemenuhan Jasa Penunjang	1.059.542.968	233.117.639	100%	21.99%
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.514.000	0.00	3	0
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	303.275.400	44.429.247	12	12
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayamam Umum Kantor	754.753.568	188.688.392	3	3
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Hasil : Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	450.064.360	139.190.160	100%	30.93%
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	107.451.176	11.980.496	1	1
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	69.613.184	7.781.664	1	1
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	33.000.000	0.00	10	0
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	240.000.000	119.428.000	3	3
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase laporan trantibum yang di fasilitasi	69.113.000	11.424.000	100%	11.98%

Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Hasil : Persentase laporan trantibum yang di fasilitasi	69.113.000	11.424.000	100%	11.98%
Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	69.113.000	11.424.000	1	1
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa dengan laporan keuangan dan administrasi baik	74.912.000	3.028.000	84.50%	3.02%
Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Hasil : Persentase desa dengan laporan keuangan dan administrasi baik	74.912.000	3.028.000	84.50%	3.02%
Sub Kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	74.912.000	3.028.000	1	1
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	1.657.695.800	696.914.000	100%	37.98%
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Hasil : Persentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	1.643.471.000	696.914.000	100%	38.41%
Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1.576.308.000	629.751.000	3	3
Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	67.163.000	67.163.000	3	3
PROGRAM PENYELENGGARAAN	Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar	5.852.617.023	1.907.890.000	89.25%	22.87%

PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	dan Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara				
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Hasil : Persentase terpenuhinya paten sesuai dengan standart	17.920.000	2.920.000	89.25%	13.09%
Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	17.920.000	2.920.000	2	2
Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Hasil : Persentase infrastruktur dasar yang terpelihara	5.834.697.023	1.904.970.000	89.25%	32.65%
Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah dokumen koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum	5.834.697.023	1.904.970.000	1	1
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Prosentase Program Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum	290.030.800	0.00	75%	0.00%
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Hasil : Persentase Orang yang mengikuti pembinaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	290.030.800	0.00	75%	0.00%
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila,	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan	199.452.800	-	12	0

Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				
Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	1.059.542.968	-	12	0
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1.514.000	30.933.925	1	0
Jumlah Belanja Daerah		16.634.240.132	4.428.787.197		

Berdasarkan tabel di atas, Realisasi Anggaran Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang sampai dengan Maret 2025 (Triwulan I) adalah Rp 4.428.787.197 atau sekitar 51,06% dari pagu anggaran Rp 16.634.240.132.

Dengan realisasi keuangan mencapai 51,06 % pada Triwulan I Tahun 2025, capaian fisik dapat di rata-ratakan 50%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang dari sisi keuangan maupun fisik pada pertengahan Tahun 2025 sudah optimal.

BAB III
PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN KRESEK KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2025

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kresek Kabuupaten Tangerang Tahun 2025 ini menjabarkan kebutuhan prioritas program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dan sebagai bahan evaluasi dari capaian program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan di tahun yang lalu, sebagai panduan kinerja bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun berjalan dan perencanaan bagi program dan kegiatan yang akan datang.

Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang pada Tahun 2025 melaksanakan 6 (Enam) Program Utama, 12 Kegiatan, dan 30 Sub Kegiatan yang tercantum dalam program kinerja nomenklaturnya mengacu pada nomenklatur yang terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Daerah, dan dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi , Validasi Dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenlatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, dibawah ini merupakan rekapitulasi program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta anggaran, yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
3. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
4. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
5. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
6. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Keenam program yang tercantum dalam progran kinerja akan dianalisis sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan, anggaran Rp 8.405.923.309,00 menjadi Rp 7.920.968.445;
   Indikator Program: Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan dengan target 100%;
2. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum, dengan anggaran Rp 95.379.000 menjadi Rp 69.113.000
   Indikator Program: Persentase laporan trantibum yang di fasilitasi dengan target 100%;
3. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa, dengan anggaran Rp100.104.000 menjadi Rp 74.912.000;
   Indikator Program: Persentase desa dengan laporan keuangan dan administrasi baik dengan target 84,50%;
4. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan, dengan anggaran Rp 722.090.700, mejadi Rp 735.590.700,00;
   Indikator Program: Persentase kelompok masyarakat yan mendapat pembinaan/pemberdayaan, dengan target 92%;
5. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik, dengan anggaran Rp 3.946.730.576,00, menjadi Rp 5.160.958.075,00;
   Indikator Program: Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara dengan target 89,50%, dan Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar dengan target 89,50%;
6. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, dengan anggaran Rp 273.147.950,00, menjadi Rp 261.897.950,00;

Indikator Program: Prosentase Program Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum 75,00%;

Tabel 3.1
Pendanaan Program dan Kegiatan Kecamatan Kresek Tahun 2025

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan			
				2025			
				Target	Murni (Rp)	Perubahan (Rp)	Selisih (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Nilai AKIP KECAMATAN KRESEK	**Nilai**	80.10 (BB)			
7.1.1.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan**	**Persen**	**100%**	**8.405.653.309**	8.218.123.229	
7.1.1.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100%	337.351.000	251.212.920	
		Hasil : Persentase Ketersediaan Dokumen perencanaan dan Pelaporan	Dokumen	11			
7.1.1.01.2.01.0001	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4	117.383.000	81.443.720	
7.1.1.01.2.01.0006	Sub Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	136.648.000	108.009.200	
7.1.1.01.2.01.0007	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	6	83.320.000	61.760.000	
7.1.1.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Hasil : Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100%	5.863.571.581	5.836.754.581	
7.1.1.01.2.02.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	23	5.760.683.581	5.760.683.581	

7.1.1.01.2.02.0007	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	2	102.888.000	76.071.000	
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Keluaran : Jumlah pegawai yang difasilitas	Persen	100%	142.316.000	127.845.000	
	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	50	72.094.000	72.094.000	
	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Paket	50	70.222.000	55.751.000	
7.1.1.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Keluaran : Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100%	552.442.400	492.703.400	
7.01.01.2.06.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5	30.734.500	30.734.500	
7.01.01.2.06.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	13	210.195.400	210.195.400	
7.01.01.2.06.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	27	63.068.500	63.068.500	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5	24.280.000	20.707.000	
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	7	60.000.000	60.000.000	
7.01.01.2.06.0008	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	27	66.250.000	59.220.000	

7.01.01.2.06.0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	190	97.914.000	48.778.000	
7.1.1.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Keluaran : Tersedianya Jasa Penunjang	Persen	100%	1.059.907.968	1.059.542.968	
7.1.1.01.2.08.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Orang	1	1.879.000	1.514.000	
7.1.1.01.2.08.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jenis	2	303.275.400	303.275.400	
7.1.1.01.2.08.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan/ Orang	14	754.753.568	754.753.568	
7.1.1.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Keluaran : Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100%	450.064.360	450.064.360	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	6	69.613.184	69.613.184	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	6	107.451.176	107.451.176	39.245.300,00
7.1.1.01.2.09.0006	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	13	33.000.000	33.000.000	
7.1.1.01.2.09.0009	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	240.000.000	240.000.000	
		Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	91.08			

7.1.4.01	**Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum**	**Persentase laporan trantibum yang di fasilitasi**	**Persen**	**100%**	**95.379.000**	**69.113.000**	
7.1.4.01.2.09	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Keluaran : Jumlah kegiatan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	Persen	100%	95.379.000	69.113.000	
7.1.4.01.2.09.0001	Sub Kegiatan Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia Dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	9	95.379.000	69.113.000	
7.1.6.01	**Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persentase desa dengan laporan keuangan dan administrasi baik**	**Persen**	**65,14%**	**100.104.000**	**74.912.000**	
7.1.6.01.2.09	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi Dan Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Hasil : Persentase desa dengan laporan keuangan dan administrasi baik	Persen	65,14%	100.104.000	74.912.000	
7.1.6.01.2.09.0001	Sub Kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa Di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Dokumen/Desa	9	100.104.000	74.912.000	
7.1.3.01	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan**	**Persentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan**	**Persen**	**70,00%**	**1.834.756.800**	1.657.695.800	
7.1.6.01.2.09	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Hasil : Persentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	Persen	70%	1.814.383.000	1.643.471.000	
7.01.03.2.01.0001	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	9	1.747.220.000	1.576.308.000	
7.01.03.2.01.0003	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga	9	67.163.000	67.163.000	

	Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa		Kemasyarakatan				
7.1.6.01.2.09	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Hasil : Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persen	70%	20.373.800	14.224.800	
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Meningkatnya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		**7**	20.373.800	14.224.800	
7.1.6.01	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik**	**Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara**	**Persen**	**89,25%**	**5.856.997.023**	5.852.617.023	
7.1.6.01.2.09	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan	Keluaran : Pemenuhan sarana dan prasarana Paten di Kecamatan	Persen	89,25%	22.300.000	17.920.000	
7.1.6.01.2.09.0001	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	2	22.300.000	17.920.000	
7.1.6.01.2.09	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana Dan Sarana Pelayanan Umum	Keluaran : Jumlah infrastruktur yang dipelihara	Persen	89,25%	5.834.697.023	5.834.697.023	
7.1.6.01.2.09.0001	Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah Dan/Atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah dokumen koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum	Dokumen	5	5.834.697.023	5.834.697.023	
7.1.6.01	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**Prosentase Program Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum**	**Persen**	**75%**	**341.350.000**	290.030.800	

7.1.6.01.2.09	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Keluaran : Jumlah Orang yang mengikuti pembinaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persen	75,00%	341.350.000	290.030.800	
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan Dan Ketahanan Nasional Dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan Dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang	50	225.683.000	199.452.800	
7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Persatuan Dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Orang	50	46.771.000	34.573.000	
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	10	68.896.000	56.005.000	
					16.634.510.132	16.162.491.852	

BAB V
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja PD) Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang Tahun 2025 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun dengan menjabarkan dokumen Renstra Kecamatan Kresek Tahun 2024-2026, dan merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan orientasi pada hasil yang ingin dicapai selama Tahun 2025 ini.

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja PD) Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang Tahun 2025 merupakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan.

Dengan mengintegrasikan dokumen perencanaan dan penganggaran yang dimiliki oleh Kecamatan, penyusunan Renja diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di intern Kecamatan maupun di lingkup Kabupaten. Akhirnya dengan tersusunnya Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja PD) Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang Tahun 2025 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian Visi Pemerintah Kabupaten Tangerang yaitu ***"Kabupaten Tangerang Berdaya Saing Menuju Masyarakat Madani"***

40. Kecamatan Kronjo

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 272-273, Rencana Kerja Perubahan yang selanjutnya disingkat dengan Renja memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Kecamatan Kronjo. Dalam Permendagri No 86 Tahun 2017 Pasal 1 ayat 29, Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah (Renja PD) merupakan dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 *(satu)* tahun.

Renja Kecamatan Kronjo Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan bersifat teknis operasional yang menjabarkan Renstra Kecamatan Kronjo Tahun 2024-2026, serta mengacu kepada Tema perubahan RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2025 yaitu **"PEMERATAAN PEMBANGUNAN BERWAWASAN LINGKUNGAN DALAM UPAYA PENINGKATAN DAYA SAING DAERAH MELALUI KOLABORASI ANTAR SEKTOR"**. Oleh karena itu, Rencana Kerja Perubahan (Renja) Kecamatan Kronjo diharapkan dapat mendukung dokumen Renstra Kecamatan Kronjo periode 2024-2026 serta mendukung Tema RKPD yang sudah ditentukan dan sebagai titik awal pelaksanaan rencana strategis pembangunan Tahun 2025 – 2029.

Renja Kecamatan Kronjo menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja) Kecamatan Kronjo setiap tahunnya dalam 1 *(satu)* tahun anggaran. Renja Kecamatan Kronjo juga menjadi acuan dalam mengendalikan dan mengevaluasi pembangunan pada lingkungan Kecamatan Kronjo. Selain itu, Renja berperan sangat penting dalam menuntun Kecamatan Kronjo untuk berkonstribusi mewujudkan cita-cita dan tujuan pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengoptimalkan penggunaan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh daerah. Renja Kecamatan Kronjo berkontribusi dalam mewujudkan tujuan pembangunan

Kabupaten Tangerang berkaitan dengan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, serta Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.

Dalam menyusun Renja Kecamatan Kronjo terdapat beberapa proses yang harus ditempuh yaitu dari persiapan penyusunan Renja Kecamatan Kronjo, penyusunan rancangan Renja Kecamatan Kronjo, penyusunan Rancangan Akhir Renja Kecamatan Kronjo, hingga penetapan Renja Kecamatan Kronjo. Selain itu, dokumen Renja memiliki keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan, antara lain RPD, Renja/Resntra K/L dan Renja/Resntra provinsi/kabupaten/kota, dan Renja/Resntra Kecamatan Kronjo. Keterkaitan antara Renja Kecamatan Kronjo dengan RPD, Renja/Resntra K/L dan Renja/Resntra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja/Resntra Kecamatan Kronjo tersebut berupa tugas dan fungsi Kecamatan Kronjo sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Kecamatan Kronjo Kabupaten, Peraturan Kepala Daerah Kabupaten tentang Tugas dan Fungsi Kecamatan Kronjo, RPD Kabupaten dan memperhatikan Renja Kementerian/Lembaga, Renja Kecamatan Kronjo Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Tangerang.

Secara khusus, Adapun kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Kecamatan Kronjo sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Verifikasi Rancangan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 Kecamatan Kronjo Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, serta Berita Acara Kesepakatan Penggunaan Pagu Pendanaan Kecamatan Kronjo Tahun Anggaran 2025 ialah sebagai berikut:

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

(Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Kecamatan Kronjo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 632);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

18. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
19. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
20. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
22. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara perencanaan, pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daearah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O17 Nomor 13l2);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 14);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
29. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru;
30. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentangRencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 26);
31. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten 2010-2030;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2008 Nomor 01, Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0108);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2009 Nomor 02, Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0209);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 09 Tahun 2009 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah
35. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2009 Nomor 12);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Kecamatan Kronjo

Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2016 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2016 Nomor 1611);

37. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah;
38. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 33 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2023 Nomor 33).
39. Permendagri Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan dimaksudkan sebagai arahan dan pedoman bagi Kecamatan Kronjo untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Untuk itu maksud disusunnya Renja Perubahan Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

a. Memberikan acuan resmi bagi Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang dalam menyusun Rencana Kerja Perubahan (Renja) Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang sekaligus menjadi acuan dalam menentukan program dan kegiatan tahunan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kronjo Kabupaten Kabupaten;
b. Menyediakan dokumen perencanaan Kecamatan Kronjo untuk kurun waktu tiga tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Kecamatan Kronjo sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Kronjo;
c. Menjabarkan gambaran tentang kondisi Kecamatan Kronjo sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang;

d. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Kecamatan Kronjo dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
e. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Kecamatan Kronjo untuk memahami, menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu tiga tahunan;
f. Mengetahui apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan organisasi guna mendukung dan memenuhi tujuan dan sasaran untuk 1 *(satu)* tahun anggaran;
g. Menyesuaikan Perubahan pada RPD Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026.

Adapun tujuan penyusunan dokumen Renja Perubahan, antara lain adalah :

a. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kronjo yaitu untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang dan mewujudkan cita-cita yang ingin dicapai dalam 1 *(satu)* tahun anggaran sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab yang diemban Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang;
b. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama 1 *(satu)* tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kronjo dalam mendukung tujuan dan sasaran kepala daerah;
c. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Kronjo selama 1 *(satu)* tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja Kecamatan Kronjo;
d. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Kecamatan Kronjo dalam menyusun Rencana Kerja Perubahan (Renja) Kecamatan Kronjo yang merupakan dokumen perencanaan Kecamatan Kronjo tahunan dalam kurun waktu 1 *(satu)* tahun.

1.4. Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Kronjo Tahun 2025 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I PENDAHULUAN
1.1 Latar belakang;
1.2 Landasan Hukum;
1.3 Maksud dan tujuan;
1.4 Sistematika penulisan;

Bab II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Triwulan I dan Capaian Renstra Kecamatan Kronjo
2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Kecamatan Kronjo
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Kronjo
2.4. Review Terhadap Rencana Awal RKPD
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN KRONJO
3.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Kronjo
3.2. Tujuan dan Sasaran Kecamatan Kronjo
3.3. Program Kegiatan dan Sub Kegiatan
Bab VI Penutup

BAB II
EVALUASI RENJA SAMPAI DENGANTRIWULAN I TAHUN BERKENAAN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Kronjo Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025 dan Capaian Renstra Kecamatan Kronjo.

Proses penyusunan suatu perencanaan erat kaitannya dengan proses evaluasi, dari hasil evaluasi dapat teridentifikasi dua hal yaitu sejauh mana proses perencanaan pembangunan dilaksanakan oleh SKPD dan permasalahan-permasalahan yang menghambat pelaksanaan perencanaan pembangunan tersebut. Evaluasi terhadap Renja Kecamatan Kronjo dan capaian renstra Kecamatan Kronjo s/d Triwulan II Tahun 2024 yang memuat indikator keberhasilan suatu proses perencanaan pembangunan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun, yang dijadikan sebagai tolak ukur untuk menilai sejauh mana perencanaan pembangunan telah dilaksanakan. Keberhasilan pencapaian Visi dan Misi akan sangat dipengaruhi oleh tingkat kualitas sumberdaya manusia. Karena manusia sebagai subyek pelaku pembangunan yang sangat berperan dan menentukan baik sebagai perencana, pelaksana, pengguna maupun sebagai evaluator dari hasil kegiatan pembangunan. Dengan demikian tingginya tingkat kualitas sumber daya manusia para pelaku pembangunan (masyarakat, pemerintah maupun dunia usaha) sangat diperlukan dalam upaya mencapai tujuan pembangunan. Sesuai dengan tuntutan persaingan dan perkembangan dunia di era globalisasi dimana informasi terus berkembang peningkatan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Tangerang khususnya perlu diarahkan pada upaya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang diharapkan akan mampu tumbuh, berdaya tahan dan mampu bersaing serta tumbuhnya jiwa kewirausahaan. Disisi lain evaluasi hasil perencanaan tahun yang lalu akan menambah basis data untuk merencanakan program dan kegiatan selanjutnya.

Tujuan Evaluasi

1. Menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan: melalui evaluasi maka dapat diketahui derajat pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan.
2. Mengukur tingkat efisiensi suatu kebijakan: melalui evaluasi dapat diketahui berapa biaya dan manfaat dari suatu kebijakan.
3. Mengukur tingkat keluaran: mengukur berapa besar dan kualitas Pengeluaran atau output dari suatu kebijakan.
4. Mengukur dampak suatu kebijakan: evaluasi ditujukan untuk melihat dampak dari suatu kebijakan, baik dampak positif maupun negatif.
5. Untuk mengetahui apabila ada penyimpangan: untuk mengetahui adanya penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi, dengan cara membandingkan antara tujuan dan sasaran dengan pencapaian target.
6. Sebagai masukan (input) suatu kebijakan yang akan

datang: untuk memberikan masukan bagi proses kebijakan ke depan agar dihasilkan kebijakan yang lebih baik.

Indikator Evaluasi

1. Efektivitas: apakah hasil yang diinginkan telah tercapai.
2. Kecukupan: seberapa jauh hasil yang telah tercapai dapat memecahkan masalah?
3. Pemerataan: apakah biaya dan manfaat didistribusikan merata kepada kelompok masyarakat berbeda?
4. Responsivitas: apakah hasil kebijakan memuat preferensi/nilai kelompok dan dapat memuaskan mereka?
5. Ketepatan: apakah hasil yang dicapai bermanfaat?
6. Kaitan antara Monitoring dan Evaluasi adalah evaluasi memerlukan hasil dari monitoring dan digunakan untuk kontribusi program.

Evaluasi Pelaksanaan Renja Perubahan Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Kronjo dan Pencapaian
Renstra Kecamatan Kronjo s/d Tahun 2025 Triwulan I

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Kecamatan Kronjo) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2025	Target dan Realisasi Kinerja Program dan \ Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target program dan kegiatan Renja Kecamatan Kronjo tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Kecamatan Kronjo s/d tahun berjalan	
					Target Renja Kecamatan Kronjo tahun 2024	Realisasi Renja Kecamatan Kronjo tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7+9	11=(10/4)
7.01	**KECAMATAN**									
07.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	100	100	100	100	100	100	100	100
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Kecamatan Kronjo	5	5	5	5	100	5	5	100
7.01.01.2.01.01	*Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	Jumlah Dokumen Perencanaan Kecamatan Kronjo	5	5	5	5	100	5	5	100
7.01.01.2.01.06	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	1	1	1	100	1	1	100
7.01.01.2.01.07	*Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Kecamatan Kronjo	6	6	6	6	100	6	6	100
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dokumen adminstrasi keuangan	25	25	25	25	100	25	25	100
7.01.01.2.02.01	*Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	Persentase Ketersediaan Dokumen perencanaan dan Pelaporan	25	25	25	25	100	25	25	100
7.01.01.2.02.07	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD*	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	1	1	100	1	1	100
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Pembinaan Pegawai	2	2	2	2	100	2	2	100
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	25	25	25	25	100	25	25	100
7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	25	25	25	25	100	25	25	100

7.01.01.2.06	Administrasi Umum Kecamatan Kronjo	Jumlah dokumen Administrasi Umum Kecamatan Kronjo	8	8	8	8	100	8	8	100
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5	5	5	5	100	5	5	100
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	1	1	1	100	1	1	100
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20	20	20	20	100	20	20	100
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	23	23	23	23	100	23	23	100
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	11	11	11	11	100	11	11	100
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undanga	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	12	12	12	100	12	12	100
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	3425	3425	3425	3425	100	3425	3425	100
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2	2	2	2	100	2	2	100
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen Jasa Penunjang	3	3	3	3	100	3	3	100
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	1	1	1	100	1	1	100
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	7	7	7	7	100	7	7	100
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	11	11	11	11	100	11	11	100
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4	4	4	4	100	4	4	100
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2	2	2	2	100	2	2	100
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7	7	7	7	100	7	7	100
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15	15	15	15	100	15	15	100
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	5	5	5	100	5	5	100
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar	100	100	100	100	100	100	100	100

		Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara	100	100	100	100	100	100	100	100
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Kecamatan Kronjo yang Ada di Kecamatan	Jumlah laporan pelayanan	1	1	1	1	100	1	1	100
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2	2	2	2	100	2	2	100
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	jumlah dokumen pemeliharaan	5	5	5	5	100	5	5	100
7.01.02.2.03.01	Koordinasi/Sinergi dengan Kecamatan Kronjo dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Kecamatan Kronjo dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	1	1	1	1	100	1	1	100
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1	1	1	1	100	1	1	100
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	100	100	100	100	100	100	100	100
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Pemberdayaan	2	2	2	2	100	2	2	100
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	2	2	2	2	100	2	2	100
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	8	8	8	8	100	8	8	100
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	100	100	100	100	100	100	100	100
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	jumlah laporan gangguan trantibum	1	1	1	1	100	1	1	100
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	6	6	6	6	100	6	6	100
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase tertib administrasi pemerintahan desa	100	100	100	100	100	100	100	100
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	8	8	8	8	100	8	8	100
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	8	8	8	8	100	8	8	100
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	8	8	8	8	100	8	8	100

7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	8	8	8	8	100	8	8	100
7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	8	8	8	8	100	8	8	100
7.01.06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	8	8	8	8	100	8	8	100
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	100	100	100	100	100	100	100	100
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	jumlah rekomendasi yang dikeluarkan	8	8	8	8	100	8	8	100
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	50	50	50	50	100	50	50	100
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	8	8	8	8	100	8	8	100

Beradasakan Tabel diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

Kesimpulan:

1) Melaksanakan Evaluasi Capaian Program dan Kegiatan sesuai dengan target Renstra 2025-2026;
2) Memonitoring hasil capaian program dan kegiatan pada Triwulan ke I tahun pertama sesuai realisasi fisik pelaksanaan di lapangan;
3) Melaksanakan monitoring realisasi anggaran pada triwulan I atas program dan kegiatan terutama program strategis yang dilimpahkan kepada pemerintah Kecamatan;
4) Menyusun Berita Acara Monitoring dan Evaluasi berkala Capaian Renstra 2024-2026 kecamatan Kronjo kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2025 pada Triwulan I.

Kendala yang ditemukan :

1. Adanya perubahan harga satuan dilapangan sehingga perubahan pada Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah ditetapkan.

Langkah-langkah yang harus diambil :

1. Koordinasi dengan pihak ketiga untuk percepatan penyelesaian pelaksanaan kegiatan kontruksi

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Kronjo

Sebagaimana yang tercantum dalam dokumen Renstra Kecamatan Kronjo Tahun 2024-2026, Kecamatan Kronjo membantu Bupati untuk mengemban kewenangan dibidang pemerintahan umum, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Kecamatan Kronjo di tingkat Kecamatan, membina dan mengawasai penyelenggaraan kegiatan Desa dan Kelurahan, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Kecamatan Kronjo yang ada di kecamatan, dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana tugas dan kewenangan tersebut, Kecamatan Kronjo memiliki fungsi untuk menyelenggarakan penyiapan rumusan kebijakan teknis, penyiapan rencana dan program kegiatan, penyiapan koordinasi kegiatan, penyiapan bimbingan pelaksanaan kegiatan, pengelolaan administrasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan. Permasalahan yang menjadi urusan Kecamatan Kronjo dalam melaksanakan fungsi-fungsi yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintah untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi yang menjadi kewenangannya dalam melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan

No.	Indikator Kinerja Penyelenggaraa	Interpretasi Belum Tercapai (<)	Permasalahan	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan

	n Pemerintah Daerah	sesuai (=) Melampaui (>)		
1	Nilai AKIP Kecamatan Kronjo	=	a) Masih terdapat kendala dalam penyajian data-data; b) Masih banyaknya keterlambatan pemberian data.	a) Memberikan pemahaman kepada para penanggung jawab kegiatan tentang tata cara pelaporan hasil kegiatan; b) Melakukan evaluasi Kinerja secara berkala.
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat	>	a) Belum maksimalnya Pelaksanaan program Administrasi Pemerintahan dan Pelayanan Umum; b) Masih lemahnya Pengelolaan Administrasi Desa; c) Pelaksanaan SOP yang belum optimal.	a) Memaksimalkan kegiatan pada program Administrasi Pemerintahan dan Pelayanan Umum; b) Meningkatkan Pemahaman Pengelola Administrasi Desa; c) Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) dan mengoptimalkan SOP

Selain dari uraian pada halaman sebelumnya, analisis kinerja pelayanan Kecamatan Kronjo merupakan kajian terhadap capaian kinerja palayanan Kecamatan Kronjo berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan.
Kinerja pelayanan Kecamatan Kronjo dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja sebagai berikut:

1) Terdapat perubahan personil pada struktur susunan organisasi yang berdampak pada penyegaran tubuh organisasi sehingga dapat melaksanakan program dan pelaksanaan kegiatan dengan baik;
2) Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum;
3) Meningkatnya upaya pemberdayaan masyarakat;
4) Meningkatnya inovasi kecamatan tentang pelayanan dengan adanya inovasi *self service*.

Adapun beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Kronjo ditengah upaya menjalankan tugas dan fungsinya. Permasalahan ini telah teridentifikasi sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Kronjo yang juga terdapat dalam dokumen Renstra Kecamatan Kronjo Tahun 2024-2026 yang dapat terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.3
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Kecamatan Kronjo

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Isu Strategis
1	2	3	4	5
1	Belum Optimalnya Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan Belum Optimal	Belum Tersedianya Database Rencana Pembangunan	Rendahnya kemampuan dan ketrampilan SDM dalam pengelolaan kegiatan ekonomi
			Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tidak Tepat Waktu	Kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa yang masih kurang
			Pemberdayaan ekonomi kerakyatan masih rendah	Ancaman penyakit menular DBD, Malaria, dan Chikungunya
			Pembinaan Keagamaan, Sosial dan Kepemudaan serta ketentraman dan ketertiban umum belum maksimal	Perlunya perkerasan dan pengaspalan jalan yang menghubungkan beberapa desa/kelurahan
			Kebijakan tata ruang wilayah kecamatan yang belum tertata dengan memperhatikan lingkungan	Sering terjadinya kecelakaan lalu lintas karena jalan sempit dan padat kendaraan
			Masih minimnya kepedulian masyarakat tentang kebersihan dan persampahan	Masih adanya tanah masyarakat yang belum bersertifikat
			Infrastruktur penunjang lingkungan masih minim	Masih adanya rumah tidak layak huni
		Belum Optimalnya Pelayanan Publik	Penerapan Sistem Pelayanan Berbasis IT Rendah	Permasalahan kekurangan permodalan dan tunggakan pinjaman

				masyarakat dalam lembaga keuangan
			Infrastruktur Pelayanan Publik Masih Kurang	Permasalahan Kesehatan Masyarakat
			Kurangnya Koordinasi dan Pembinaan Pelayanan Publik dengan Pemerintah Desa	Kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa yang masih kurang
			SOP dan SPM yang dibuat belum sesuai dengan standar	Tingginya permintaan masyarakat dalam pelayanan Jaminan Kesehatan

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Kronjo

Kecamatan Kronjo memiliki keterkaitan dengan Dokumen Renstra (Rencana Strategis) Tujuan ke 1 (Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Digitalisasi dan Integrasi Pelayanan Publik) sasaran ke 2 (Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik).

1. Masih adanya kondisi rumah yang tidak layak huni di Desa Pasilian, Pagenjahan dan Kronjo
2. Kurang tertatanya pasar Desa di Desa Kronjo
3. Belum optimalnya pengelolaan BUMDES di Desa Pagedangan Udik
4. Masih ditemukannya titik sampah yang belum tertangani

Kecamatan Kronjo berperan untuk Mewujudkan Tata Pemerintahan yang baik, Demokratis dan Partisipatif. Oleh karena itu, Kecamatan Kronjo perlu mengidentifikasi faktor penghambat dan faktor pendorong pelayanan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran tersebut sebagaimana tertera pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.4
Faktor Pendorong dan Penghambat Pencapaian Tujuan dan Sasaran Kecamatan Kronjo

No	Sasaran	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Terpenuhinya pelayanan publik sesuai dengan standar kecamatan	a) Masih terdapat kendala dalam penyajian data-data; b) Masih banyaknya keterlambatan pemberian data.	a) Memberikan pemahaman kepada para penanggung jawab kegiatan tentang tata cara pelaporan hasil kegiatan;

			b) Melakukan evaluasi Kinerja secara berkala.
2.	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja	a) Masih terdapat kendala dalam penyajian data-data; b) Masih banyaknya keterlambatan pemberian data.	a) Memberikan pemahaman kepada para penanggung jawab kegiatan tentang tata cara pelaporan hasil kegiatan; b) Melakukan evaluasi Kinerja secara berkala.

Adapun dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Kronjo sangat dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang lebih ditail, sehingga semua langkah-langkah yang disusun dalam Renja Kecamatan Kronjo sejalan dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tangerang 2025 – 2026.

Sesuai dengan visi "***Mewujudkan Masyarakat Yang Religius, Cerdas, Sehat dan Sejahtera***", maka Kecamatan Kronjo mengusulkan program prioritas kepada Kecamatan Kronjo tahun 2024-2026 sebagai berikut:

2.4 Review Terhadap Rencana Awal RKPD

Review terhadap rancangan Awal RKPD Tahun 2025 berkaitan dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2025. Rumusan kebutuhan program dan kegiatan dilengkapi dengan lokasi, indikator kinerja, besaran target/tolok ukur, dan besaran dana yang dibutuhkan.

Pada tahun anggaran 2025 review rancangan awal RKPD terhadap hasil analisis kebutuhan dapat disampaikan sebagai Lampira

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KAB. TANGERANG
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		KECAMATAN SUKAMULYA							**12.255.546.191,00**	**14.930.071.430,00**	**15.057.108.184,00**	**2.801.561.993,00**							**12.255.546.191,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**12.255.546.191,00**	**14.930.071.430,00**	**15.057.108.184,00**	**2.801.561.993,00**							**12.255.546.191,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**12.255.546.191,00**	**14.930.071.430,00**	**15.057.108.184,00**	**2.801.561.993,00**							**12.255.546.191,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan**				**100 Persen**	**100 Persen**	**7.446.895.217,00**	**8.321.829.656,00**	**8.704.828.506,00**	**-5.403.028,00**							**7.441.492.189,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				5 Dokumen	5 Dokumen	176.230.279,00	193.041.979,00	149.000.734,00	-27.229.545,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Pelayanan Masyarakat		176.230.279,00	KECAMATAN SUKAMULYA
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	73.075.980,00	70.005.480,00	52.304.110,00	-20.771.870,00	Kab. Tangerang, Sukamulya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			73.075.980,00	KECAMATAN SUKAMULYA
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	65.484.799,00	76.562.999,00	60.656.749,00	-4.828.050,00	Kab. Tangerang, Sukamulya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			65.484.799,00	KECAMATAN SUKAMULYA
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6 Laporan	6 Laporan	37.669.500,00	46.473.500,00	36.039.875,00	-1.629.625,00	Kab. Tangerang, Sukamulya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			37.669.500,00	KECAMATAN SUKAMULYA

	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen adminstrasi keuangan* *Jumlah dokumen dokumen adminstrasi keuangan*				25 Orang 2 Dokumen	25 Orang 2 Dokumen	4.382.660.014,00	4.602.208.685,00	4.840.164.033,00	457.504.019,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Pelayanan Masyarakat		4.382.660.014,00	KECAMATAN SUKAMULYA
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				25 Orang/bulan	25 Orang/bulan	4.345.546.191,00	4.559.244.862,00	4.808.441.166,00	462.894.975,00	Kab. Tangerang, Sukamulya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			4.345.546.191,00	KECAMATAN SUKAMULYA
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	37.113.823,00	42.963.823,00	31.722.867,00	-5.390.956,00	Kab. Tangerang, Sukamulya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			37.113.823,00	KECAMATAN SUKAMULYA
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen Pembinaan Pegawai*				2 Dokumen	2 Dokumen	106.912.000,00	103.580.700,00	92.094.525,00	-14.817.475,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Pelayanan Masyarakat		106.971.500,00	KECAMATAN SUKAMULYA
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				25 Paket	25 Paket	52.736.000,00	48.898.000,00	48.898.000,00	-3.838.000,00	Kab. Tangerang, Sukamulya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			52.795.500,00	KECAMATAN SUKAMULYA
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				25 Orang	25 Orang	54.176.000,00	54.682.700,00	43.196.525,00	-10.979.475,00	Kab. Tangerang, Sukamulya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			54.176.000,00	KECAMATAN SUKAMULYA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah*				8 Dokumen	8 Dokumen	787.635.124,00	1.269.080.164,00	1.391.651.086,00	604.015.962,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Pelayanan Masyarakat		785.273.924,00	KECAMATAN SUKAMULYA
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	31.811.600,00	31.806.300,00	31.806.300,00	-5.300,00	Kab. Tangerang, Sukamulya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			31.811.600,00	KECAMATAN SUKAMULYA
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	343.400.000,00	785.552.240,00	985.552.240,00	642.152.240,00	Kab. Tangerang, Sukamulya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			343.728.800,00	KECAMATAN SUKAMULYA
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				20 Paket	20 Paket	66.734.600,00	40.166.000,00	40.166.000,00	-26.568.600,00	Kab. Tangerang, Sukamulya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			66.734.600,00	KECAMATAN SUKAMULYA
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				32 Paket	32 Paket	98.207.600,00	98.204.400,00	98.204.400,00	-3.200,00	Kab. Tangerang, Sukamulya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			98.207.600,00	KECAMATAN SUKAMULYA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		

			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				32 Paket	32 Paket	98.207.600,00	98.204.400,00	98.204.400,00	-3.200,00	Kab. Tangerang, Sukamulya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			98.207.600,00	KECAMATAN SUKAMULYA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				11 Paket	11 Paket	64.841.324,00	64.895.224,00	49.474.146,00	-15.367.178,00	Kab. Tangerang, Sukamulya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			64.841.324,00	KECAMATAN SUKAMULYA
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	8.640.000,00	68.640.000,00	68.640.000,00	60.000.000,00	Kab. Tangerang, Sukamulya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			8.640.000,00	KECAMATAN SUKAMULYA
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				3425 Laporan	3425 Laporan	100.800.000,00	99.600.000,00	77.700.000,00	-23.100.000,00	Kab. Tangerang, Sukamulya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			98.000.000,00	KECAMATAN SUKAMULYA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	73.200.000,00	80.216.000,00	40.108.000,00	-33.092.000,00	Kab. Tangerang, Sukamulya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			73.310.000,00	KECAMATAN SUKAMULYA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah dokumen Jasa Penunjang*				3 Dokumen	3 Dokumen	944.346.000,00	978.234.168,00	1.056.234.168,00	111.888.168,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Pelayanan Masyarakat		944.521.000,00	KECAMATAN SUKAMULYA
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	14.994.600,00	14.994.600,00	-5.400,00	Kab. Tangerang, Sukamulya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			15.175.000,00	KECAMATAN SUKAMULYA
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				7 Laporan	7 Laporan	144.000.000,00	174.000.000,00	174.000.000,00	30.000.000,00	Kab. Tangerang, Sukamulya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			144.000.000,00	KECAMATAN SUKAMULYA
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				11 Laporan	11 Laporan	785.346.000,00	789.239.568,00	867.239.568,00	81.893.568,00	Kab. Tangerang, Sukamulya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			785.346.000,00	KECAMATAN SUKAMULYA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				4 Dokumen	4 Dokumen	1.049.111.800,00	1.175.683.960,00	1.175.683.960,00	126.572.160,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Pelayanan Masyarakat		1.045.835.472,00	KECAMATAN SUKAMULYA
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	2 Unit	77.263.600,00	70.441.984,00	70.441.984,00	-6.821.616,00	Kab. Tangerang, Sukamulya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			77.170.492,00	KECAMATAN SUKAMULYA
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7 Unit	7 Unit	139.948.200,00	173.341.976,00	173.341.976,00	33.393.776,00	Kab. Tangerang, Sukamulya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			136.794.980,00	KECAMATAN SUKAMULYA

			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	15 Unit	31.900.000,00	31.900.000,00	31.900.000,00	0,00	Kab. Tangerang, Sukamulya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			31.870.000,00	KECAMATAN SUKAMULYA
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				8 Unit	8 Unit	800.000.000,00	900.000.000,00	900.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Tangerang, Sukamulya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			800.000.000,00	KECAMATAN SUKAMULYA
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar**				**100 Persen**	**100 Persen**	**2.844.946.200,00**	**4.358.608.000,00**	**4.393.058.000,00**	**2.311.104,00**							**2.847.257.304,00**	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Jumlah laporan pelayanan*				1 Dokumen	1 Dokumen	165.076.000,00	118.272.000,00	103.422.000,00	-61.654.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Pelayanan Masyarakat		157.820.000,00	KECAMATAN SUKAMULYA
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	2 Laporan	165.076.000,00	118.272.000,00	103.422.000,00	-61.654.000,00	Kab. Tangerang, Sukamulya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			157.820.000,00	KECAMATAN SUKAMULYA
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	*jumlah dokumen pemeliharaan Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik Kecamatan Sukamulya*				100 Persen 5 Dokumen	100 Persen 5 Dokumen	2.632.032.000,00	4.220.936.000,00	4.280.136.000,00	1.648.104.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Pelayanan Masyarakat		2.643.097.504,00	KECAMATAN SUKAMULYA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				5 Dokumen	5 Dokumen	2.632.032.000,00	4.220.936.000,00	4.280.136.000,00	1.648.104.000,00	Kab. Tangerang, Sukamulya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			2.643.097.504,00	KECAMATAN SUKAMULYA
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan*				1 Laporan	1 Laporan	47.838.200,00	19.400.000,00	9.500.000,00	-38.338.200,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Pelayanan Masyarakat		46.339.800,00	KECAMATAN SUKAMULYA
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				1 Laporan	1 Laporan	47.838.200,00	19.400.000,00	9.500.000,00	-38.338.200,00	Kab. Tangerang, Sukamulya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			46.339.800,00	KECAMATAN SUKAMULYA
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan**				**100 Persen**	**100 Persen**	**1.257.091.374,00**	**1.603.869.474,00**	**1.464.729.928,00**	**3.091.924,00**							**1.260.183.298,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Jumlah Laporan Pemberdayaan*				2 Dokumen	2 Dokumen	1.257.091.374,00	1.603.869.474,00	1.464.729.928,00	207.638.554,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Meningkatkan Perekonomian Masyarakat	Meningkatnya Pelayanan Masyarakat		1.260.183.298,00	KECAMATAN SUKAMULYA
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	66.344.075,00	88.244.075,00	88.244.075,00	21.900.000,00	Kab. Tangerang, Sukamulya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Meningkatkan Perekonomian Masyarakat			66.344.075,00	KECAMATAN SUKAMULYA
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				8 Laporan	8 Laporan	1.190.747.299,00	1.515.625.399,00	1.376.485.853,00	185.738.554,00	Kab. Tangerang, Sukamulya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Meningkatkan Perekonomian Masyarakat			1.193.839.223,00	KECAMATAN SUKAMULYA
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti**				**100 Persen**	**100 Persen**	**161.184.000,00**	**122.789.800,00**	**122.789.800,00**	**0,00**							**161.184.000,00**	

4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti**				**100 Persen**	**100 Persen**	**161.184.000,00**	**122.789.800,00**	**122.789.800,00**	**0,00**							**161.184.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*jumlah laporan gangguan trantibum*				1 Dokumen	1 Dokumen	161.184.000,00	122.789.800,00	122.789.800,00	-38.394.200,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Pelayanan Masyarakat		161.184.000,00	KECAMATAN SUKAMULYA
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				6 Laporan	6 Laporan	161.184.000,00	122.789.800,00	122.789.800,00	-38.394.200,00	Kab. Tangerang, Sukamulya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			161.184.000,00	KECAMATAN SUKAMULYA
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti**				**100 Persen**	**100 Persen**	**150.000.000,00**	**158.372.200,00**	**108.523.650,00**	**0,00**							**150.000.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*jumlah rekomendasi yang dikeluarkan*				8 Dokumen	8 Dokumen	150.000.000,00	158.372.200,00	108.523.650,00	-41.476.350,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Pelayanan Masyarakat		150.000.000,00	KECAMATAN SUKAMULYA
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				50 Orang	50 Orang	50.000.000,00	61.744.200,00	45.171.650,00	-4.828.350,00	Kab. Tangerang, Sukamulya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			50.000.000,00	KECAMATAN SUKAMULYA
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				8 Dokumen	8 Dokumen	100.000.000,00	96.628.000,00	63.352.000,00	-36.648.000,00	Kab. Tangerang, Sukamulya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			100.000.000,00	KECAMATAN SUKAMULYA
6.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase tertib administrasi pemerintahan desa**				**100 Persen**	**100 Persen**	**395.429.400,00**	**364.602.300,00**	**263.178.300,00**	**0,00**							**395.429.400,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa*				8 Dokumen	8 Dokumen	395.429.400,00	364.602.300,00	263.178.300,00	-132.251.100,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Pelayanan Masyarakat		395.429.400,00	KECAMATAN SUKAMULYA
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				8 Dokumen	8 Dokumen	100.000.000,00	177.850.300,00	125.356.300,00	25.356.300,00	Kab. Tangerang, Sukamulya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			100.000.000,00	KECAMATAN SUKAMULYA
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				8 Dokumen	8 Dokumen	95.429.400,00	45.752.000,00	33.668.000,00	-61.761.400,00	Kab. Tangerang, Sukamulya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			95.429.400,00	KECAMATAN SUKAMULYA
	7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa				8 Dokumen	8 Dokumen	50.000.000,00	46.240.000,00	34.180.000,00	-15.820.000,00	Kab. Tangerang, Sukamulya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			50.000.000,00	KECAMATAN SUKAMULYA

			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa				8 Dokumen	8 Dokumen	50.000.000,00	46.240.000,00	34.180.000,00	-15.820.000,00	Kab. Tangerang, Sukamulya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			50.000.000,00	KECAMATAN SUKAMULYA
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa																	
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				8 Dokumen	8 Dokumen	50.000.000,00	47.380.000,00	34.987.000,00	-15.013.000,00	Kab. Tangerang, Sukamulya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			50.000.000,00	KECAMATAN SUKAMULYA
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya																	
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				8 Laporan	8 Laporan	100.000.000,00	47.380.000,00	34.987.000,00	-65.013.000,00	Kab. Tangerang, Sukamulya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			100.000.000,00	KECAMATAN SUKAMULYA
	J U M L A H								**12.255.546.191,00**	**14.930.071.430,00**	**15.057.108.184,00**	**1.284.717.462.164,00**							**12.255.546.191,00**	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Kronjo Tahun 2025 merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam arah kebijakan RPJPD Kabupaten Tangerang tahun 2024-2026 yang dijabarkan dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2026. Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Kronjo Tahun 2025 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang "Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah", Perbup RKPD Tahun 2025 Nomor 21 Tahun 2022, Tanggal 1 Juli 2022, Perbup
Perubahan RKPD Tahun 2022 No. 30 Tahun 2022 Tanggal 20 Juli 2022, agar di dalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen perencanaan. Sejalan dengan kebijakan pemerintah Propinsi Banten, tolok ukur kinerja pembangunan dilakukan melalui pengukuran indikator makro (makro ekonomi dan makro sosial), yang menempatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai indikator keberhasilan pembangunan dan evaluasi kebijakan pembangunan.

Dalam konteks perencanaan pembangunan, Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan, melayani/memenuhi kebutuhan masyarakat.

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kabupaten Tangerang

Kecamatan Kronjo

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
	Program Penunjang Urusan Pemeritahan Daerah Kabupaten/kota	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Kec. Kronjo**	**100 Persen**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	15 Dokumen	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Tangerang, Kronjo, Semua Kel/Desa	Jumlah laporan keuangan	2 Dokumen	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Tangerang, Kronjo, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pembinaan Pegawai	2 Dokumen	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Tangerang, Kronjo, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	25 Dokumen	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Tangerang, Kronjo, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Jasa Penunjang	6 Dokumen	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Tangerang, Kronjo, Semua Kel/Desa	Jumlah\ Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	15 Dokumen	
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	**Kab. Tangerang, Kronjo, Semua Kel/Desa**	**Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar dan Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara**	**100 Persen**	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kab. Tangerang, Kronjo, Semua Kel/Desa	Jumlah laporan pelayanan	2 Dokumen	
	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Kab. Tangerang, Kronjo, Semua Kel/Desa	jumlah dokumen pemeliharaan	5 Dokumen	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kab. Tangerang, Kronjo, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Dokumen	
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	**Kab. Tangerang, Kronjo, Semua Kel/Desa**	**Persentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan**	**100 Persen**	

	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kab. Tangerang, Kronjo, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pemberdayaan	8 Dokumen	
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	**Kab. Tangerang, Kronjo, Semua Kel/Desa**	**Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti**	**100 Persen**	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kab. Tangerang, Kronjo, Semua Kel/Desa	jumlah laporan gangguan trantibum	6 Dokumen	
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	**Kab. Tangerang, Kronjo, Semua Kel/Desa**	**Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti**	**100 Persen**	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab. Tangerang, Kronjo, Semua Kel/Desa	Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	10 Dokumen	

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN KRONJO

3.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Kronjo

Rencana kerja Perubahan OPD Kecamatan Kronjo tersusun dalam program yang merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program tersebut, ditetapkan beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelaskelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannyaTujuan.

Sebagai Terwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkahoperasionalnya harus dituangkan kedalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yangdiarahkan untuk memenuhi sasaran tujuan, visi dan misi organisasi. Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuntitatif maupun kualitatif. Untuk mengakomodir kebijakan yang disebabkan oleh adanya perubahan tugas pokok dan fungsi OPD Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang, diperlukan penyempurnaan maupun penyesuaian program dan kegiatan di dalam renstra OPD guna memenuhi kebutuhan tersebut.

Rencana Kerja merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu pemerintahan di Kabupaten Tangerang.

Adapun rumusan Indeks Kinerja Utama Tahun 2024-2026 adalah :

Tabel. 3.1

No	Tujuan'	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	**Meningkatkan kualitas pelayanan publik kecamatan**	Terpenuhinya pelayanan publik sesuai dengan standar kecamatan	Meningkatkan Pelayanan (PATEN) Kecamatan	Meningkatkan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan
			Meningkatkan Pembinaan/Pemberdayaan kepada Kelompok Masyarakat dan Pemuda	Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
			Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Wilayah	Meningkatkan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
		Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja	Meningkatkan Kapasitas Aparatur Pegawai	Meningkatkan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
			Meningkatkan Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Kinerja	Meningkatkan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
			Meningkatkan Kualitas Pelaporan Keuangan Kecamatan	Meningkatkan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
			Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatkan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Berdasarkan Tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Misi 4: Mewujudkan Tata Pemerintahan yang baik, demokratis dan partisipatif;

Tujuan :

a) Meningkatkan kualitas pelayanan publik kecamatan;

Sasaran :

a) Terpenuhinya pelayanan publik sesuai dengan standar kecamatan
b) Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja

Strategi :

a) Meningkatkan Pelayanan (PATEN) Kecamatan
b) Meningkatkan pembinaan/pemberdayaan kepada kelompok masyarakat dan Pemuda
c) Meningkatkan kualitas Infrastruktur Wilayah.
d) Meningkatkan Kapasitas Aparatur Pegawai
e) Meningkatkan Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Kinerja
f) Meningkatkan Kualitas Pelaporan Keuangan Kecamatan
g) Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Arah Kebijakan :

a) Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat Masyarakat Di Kecamatan;

b) Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
c) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan
d) Meningkatkan Administrasi Kepegawaian Kecamatan Kronjo
e) Meningkatkan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Kecamatan Kronjo
f) Meningkatkan Administrasi Keuangan Kecamatan Kronjo
g) Meningkatkan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

3.2. Tujuan dan Sasaran Kecamatan Kronjo

Berdasarkan uraian, data dan penjelesan pada bab-bab sebelumnya, dengan mencermati permasalahan dan potensi yang ada dan dimiliki oleh Kecamatan Kronjo serta perspektif yang ingin dicapai, maka ditetapkan tujuan strategis untuk tahun 2025. Guna mencapai tujuan tersebut, ditetapkan pula sasaran strategis sebagaimana tercantum dalam dokumen Renstra (Rencana Strategis) Kecamatan Kronjo Tahun 2024-2026.

Selain dari uraian isu strategis pada bab sebelumnya, terdapat pula fokus peningkatan pelayanan publik Kecamatan Kronjo Tahun 2025 sebagai berikut:

Fokus 1	Meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja Kecamatan Kronjo;
Fokus 2	Memenuhi pelayanan publik sesuai dengan standar kecamatan.

Dari kedua fokus layanan tersebut, akan diuraikan secara lebih rinci lagi pada penyampaian data dan/atau informasi pada tabel berikut.

Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Kecamatan Kronjo Tahun 2025

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Definisi Operasional	Target Nilai
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Kronjo	Terpenuhinya pelayanan publik sesuai dengan standar kecamatan	Nilai SKM (Nilai Survey Kepuasan Masyarakat)	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 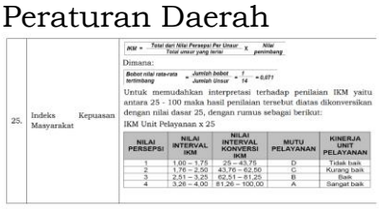	90,50
	Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88	78,49

25. Indeks Kepuasan Masyarakat

$$IKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \frac{\text{Nilai}}{\text{pembobot}}$$

Dimana:

$$\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{14} = 0,071$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu antara 25 - 100 maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut:

IKM Unit Pelayanan x 25

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL IKM	NILAI INTERVAL KONVERSI IKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1	1,00 – 1,75	25 – 43,75	D	Tidak baik
2	1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	C	Kurang baik
3	2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	B	Baik
4	3,26 – 4,00	81,26 – 100,00	A	Sangat baik

			Tahun 2021 tentang AKIP mencakup: 1.Perencanaan Kinerja, 2.Pengukuran Kinerja, 3.Pelaporan Kinerja, 4.Evaluasi Kinerja, 5.Capaian Kinerja.	

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Faktor-faktor yang menjadi bahan Pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan yaitu :

a. Pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Tangerang;
b. Pengentasan kemiskinan Ekstrim;
c. Pengentasan Stunting;
d. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah

Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:

- Kecamatan Kronjo Pada Tahun 2025 memiliki 6 Program, 13 Kegiatan dan 35 Sub Kegiatan;
- Jumlah Pagu Perubahan Kecamatan Kronjo pada Tahun 2025 Sebesar Rp. 14.260.071.020,- yang berasal dari unsur kewilayahan.

3.4. Cascading Kinerja Kecamatan Kronjo

Kata *cascading* adalah sebuah kata dalam bahasa Inggris yang kata asalnya yaitu “to cascade” punya arti “menurun”. Dalam manajemen, istilah *cascading* juga diartikan sama yaitu menurun secara bertahap, bukan terjun sekaligus. *Cascading* dalam konteks manajemen adalah “menurun” yang direncanakan, dikendalikan, dimonitor dan diukur/ dinilai. Apa yang diturunkan harus dipastikan dan diyakinkan akan menghasilkan apa yang diinginkan dan akan kembali ke-“atas”.

Definisi lain juga menyebutkan bahwa *Cascading* (penjabaran) kinerja merupakan proses penjabaran dan penyelarasan kinerja dan target kinerja secara vertikal dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah.

Memperhatikan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2023 dan daerah otonom baru, maka bagi Bupati/Walikota yang masa jabatannya berakhir di Tahun 2023, untuk menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026. Serta Surat Bupati Tangerang Nomor:050.13/6473-Bappeda tanggal 30 Desember 2022 perihal Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Kronjo Tahun 2025-2026, yang dalam suratnya menyebutkan bahwa setiap Kepala OPD (Organisasi Kecamatan Kronjo) agar segera Menyusun Renja Kecamatan Kronjo Tahun 2024-2026 sebagaimana yang tercantum pada tata cara dan tahapan

penyusunan Renja Kecamatan Kronjo yang juga disertakan bersama surat tersebut, serta dalam penentuan tujuan dan sasaran Rancangan Renja Kecamatan Kronjo Tahun 2024-2026 memperhatikan tujuan dan sasaran Rancangan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tangerang sebagaimana tercantum dalam lampiran 2 yang turut disertakan bersama surat tersebut.

Mengacu pada uraian diatas, maka Kecamatan Kronjo turut menyertakan data/informasi perihal *Cashcading* Kecamatan Kronjo yang disajikan pada Tabel 4.2 Cashcading Kinerja Kecamatan Kronjo Tahun 2025 yang juga tercantum dalam dokumen Renstra Kecamatan Kronjo Tahun 2024-2026.

Tabel 3.3
Tabel Cascading Kinerja Kecamatan Kronjo Tahun 2025

TUJUAN	SASARAN	SASARAN PROGRAM	IKP (INDIKATOR KINERJA PROGRAM)	DEFINISI OPRASIONAL	OUTPUT	OUTCAME	TANGGUNG JAWAB
MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK KECAMATAN KRONJO	Terpenuhinya pelayanan publik sesuai dengan standar kecamatan			Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)			
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar	Total terpenuhinya paten sesuai dengan standar/ total seluruh paten di masing-masing kecamatan x 100%	Jumlah laporan Pelayanan	Presentasi Terpenuhinya Jumlah laporan Pelayanan PATEN sesuai standar	KASI PELAYANAN
			Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara	Total infrastruktur dasar (penghubung desa) yang terpelihara / total infrastruktur dasar (penghubung desa) x 100%	Jumlah dokumen Pemeliharaan	presentasi terpenuhinya Jumlah dokumen Pemeliharaan fasilitas umum yang terpelihara	KASI PELAYANAN
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	(jumlah lembaga masyarakat yang mendapat pemberdayaan / jumlah lembaga pemberdayaan) x 100%	Jumlah Laporan pemberdayaan	presentasi dari Jumlah Laporan pemberdayaan yang terpenuhi	KASI PEMBERDAYAAN

		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	Total laporan trantibum yang difasilitasi / total seluruh laporan trantibum yang masuk x 100%	Jumlah Laporan gangguan trantibum	presentasi dari Jumlah Laporan gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	KASI TRANTIBUM
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase tertib administrasi pemerintahan desa	(jumlah desa yang tertib administrasi/Jumlah Desa)x100%	Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	presentasi laporan desa dengan administrasi baik	KASI BINWAS
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti /jumlah rekomendasi x 100%	Jumlah Rekomendasai yang dikeluarkan	Presentasi Rekomendasai yang dikeluarkan dan ditindaklanjuti	KASI PEMERINTAHAN
	MENINGKATNYA KUALITAS AKUNTABILITAS KINERJA			Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Kecamatan Kronjo	Jumlah Dokumen Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Kecamatan Kronjo	presentasi pemenuhan Dokumen Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Kecamatan Kronjo	KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN
					Jumlah laporan keuangan	presentasi administrasi laporan keuangan	KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN

		Jumlah pegawai difasikitasi	Presentasi Aparatur Yang Meningkat Kapasitasnya	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		Tersedianya Administrasi Umum Kecamatan Kronjo	presentasi pemenuhan Administrasi Umum Kecamatan Kronjo	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		Tersedianya Jasa Penunjang	presentasi Tersedianya Jasa Penunjang	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		Jumlah barang milik daerah	presentasi Jumlah barang milik daerah	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	presentasi dari Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Gambar 3.4
Gambaran Cascading Kinerja Kecamatan Kronjo Tahun 2025



Gambar 3.4
Gambaran Cascading Kinerja Kecamatan Kronjo Tahun 2025



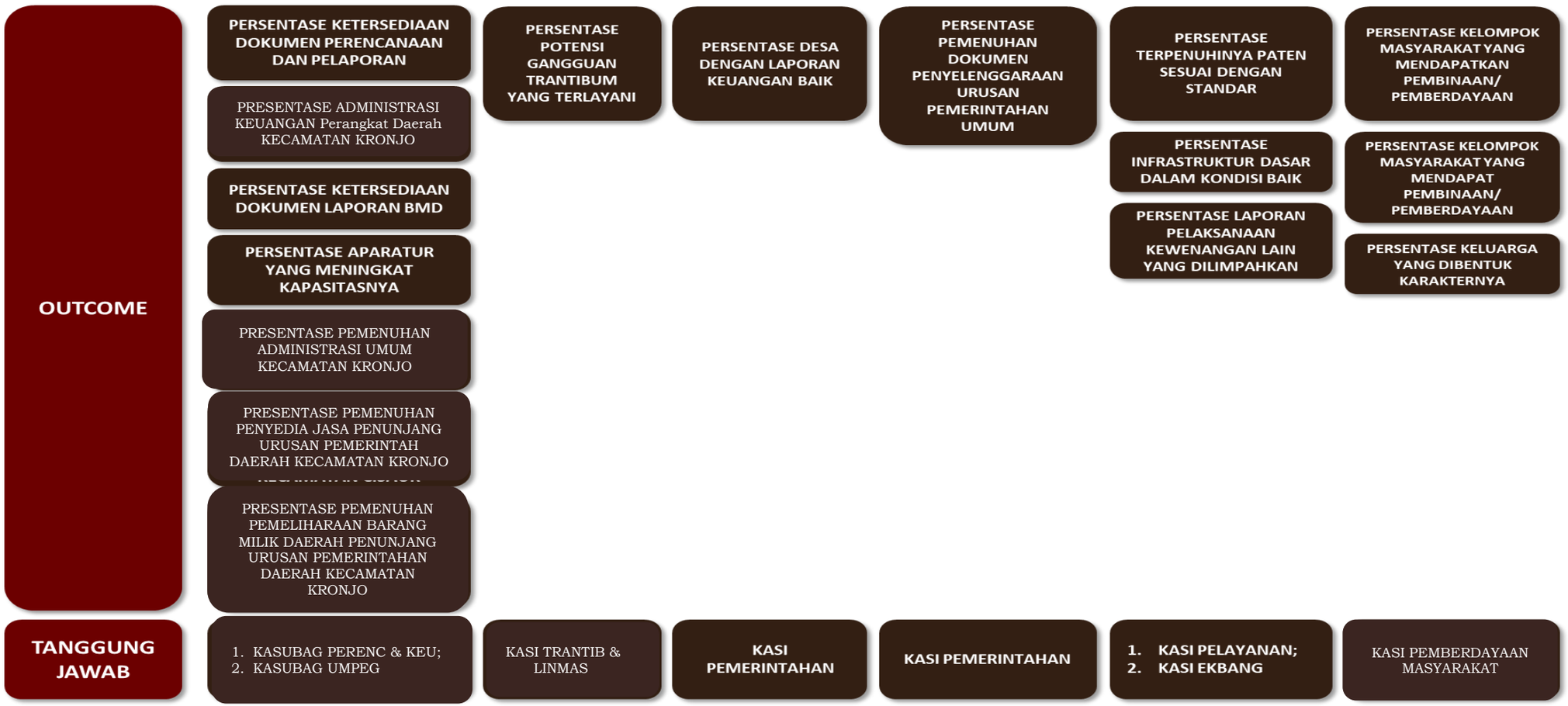
OUTCOME
PERSENTASE KETERSEDIAAN DOKUMEN PERENCANAAN DAN PELAPORAN
PRESENTASE ADMINISTRASI KEUANGAN Perangkat Daerah KECAMATAN KRONJO
PERSENTASE KETERSEDIAAN DOKUMEN LAPORAN BMD
PERSENTASE APARATUR YANG MENINGKAT KAPASITASNYA
PRESENTASE PEMENUHAN ADMINISTRASI UMUM KECAMATAN KRONJO
PRESENTASE PEMENUHAN PENYEDIA JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KECAMATAN KRONJO
PRESENTASE PEMENUHAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KECAMATAN KRONJO
PERSENTASE POTENSI GANGGUAN TRANTIBUM YANG TERLAYANI
PERSENTASE DESA DENGAN LAPORAN KEUANGAN BAIK
PERSENTASE PEMENUHAN DOKUMEN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
PERSENTASE TERPENUHINYA PATEN SESUAI DENGAN STANDAR
PERSENTASE INFRASTRUKTUR DASAR DALAM KONDISI BAIK
PERSENTASE LAPORAN PELAKSANAAN KEWENANGAN LAIN YANG DILIMPAHKAN
PERSENTASE KELOMPOK MASYARAKAT YANG MENDAPATKAN PEMBINAAN/ PEMBERDAYAAN
PERSENTASE KELOMPOK MASYARAKAT YANG MENDAPAT PEMBINAAN/ PEMBERDAYAAN
PERSENTASE KELUARGA YANG DIBENTUK KARAKTERNYA
TANGGUNG JAWAB
1. KASUBAG PERENC & KEU;
2. KASUBAG UMPEG
KASI TRANTIB & LINMAS
KASI PEMERINTAHAN
KASI PEMERINTAHAN
1. KASI PELAYANAN;
2. KASI EKBANG
KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Gambar.4.2
Gambaran Pohon Kinerja Kecamatan Kronjo Tahun 2025

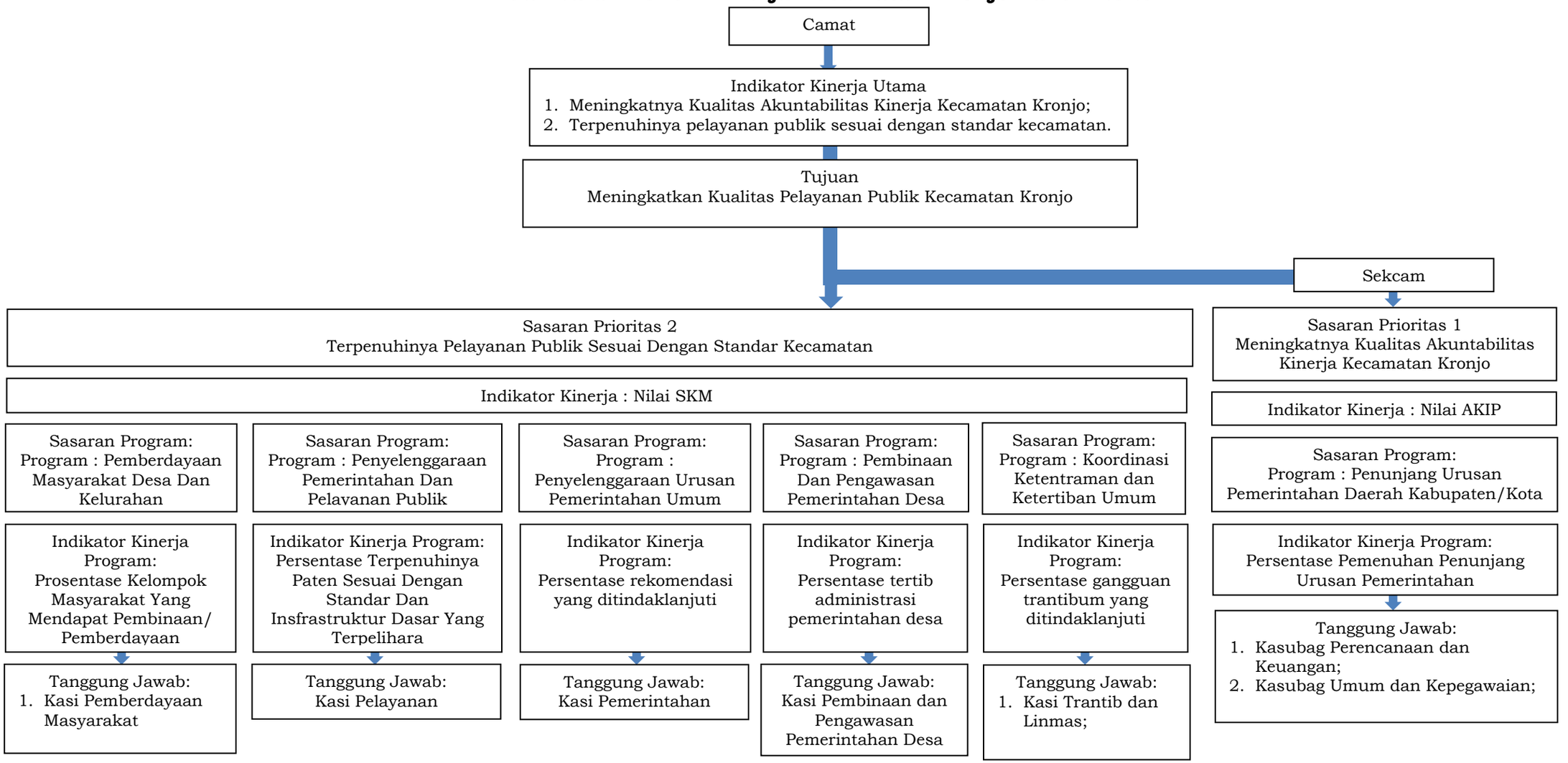

BAB IV
PENUTUP

Dokumen Rencana Kerja Perubahan (Renja) Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang Tahun 2025 ini merupakan pelaksanaan dari RPD (Rencana Pembangunan Daerah) Kabupaten Tangerang 2024-2026 yang disusun melalui penerapan perencanaan partisipatif dengan melibatkan segenap komponen *stakeholder*. Implementasi Rencana Kerja Perubahan (Renja) Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang Tahun 2025 yang lebih konkrit akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Kronjo serta dalam KUA/PPAS (Kebijakan Umum Anggaran/Prioritas Plafon Anggaran Sementara) setiap tahunnya yang tertuang dalam APBDP.

Guna mempertahankan kesinambungan pembangunan rencana pembangunan Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026 (Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026) yang diperlukan sebagai pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025-2026, maka pada tahun 2025 sudah mulai disiapkan dokumen Renja untuk Tahun Anggaran 2025. Agenda pembangunan diarahkan untuk menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang belum seluruhnya teratasi sampai dengan tahun 2025 dan masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi dalam tahun 2025. Kegiatan tersebut tidak akan berjalan baik jika tidak didukung dana atau anggaran yang memadai.

Demikian Rencana Kerja Perubahan (Renja) ini dibuat untuk perencanaan kegiatan 1 *(satu)* tahun kedepan.

41. Kecamatan Mauk

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, proses penyusunan Renja OPD terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan renja Perubahan OPD. Penyusunan Renja Perubahan OPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja Perubahan OPD yang definitif.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Renja Perubahan Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang merupakan dokumen perencanaan Kecamatan Teluknaga untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan RKPD Kabupaten Tangerang serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026.

Dalam melaksanakan kewenangan dengan memperhatikan keterkaitan antara Perencanaan Daerah dengan Perencanaan Kecamatan, maka perencanaan tujuan Kecamatan mendukung Perencanaan Permbangunan Daerah, sehingga tujuan maupun sasaran pembangunan yang ingin dicapai Pemerintah Kecamatan bersinergi dengan tujuan maupun sasaran yang ingin dicapai oleh Pemerintah Daerah. Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Tahun 2025 Kecamatan Mauk memuat usulan program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Mauk serta kerangka pendanaan daerah, RENJA Perubahan Kecamatan Mauk secara subastansial sesuai dengan Visi, Misi, agenda dan rencana resmi daerah (RKPD, RPJMD dan Renstra) dengan RENJA Perubahan K / L dan RENJA Perubahan Provinsi / Kabupaten serta tindak lanjutnya dengan proses Penyusunan RAPBD, sesuai dengan amanat Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004, Perencanaan Pembangunan harus mencakup 5 (lima) pendekatan yaitu :

1. Pendekatan politis, dimana dengan adanya pemilihan Kepala Daerah secara langsung, maka program-program yang ditawarkan oleh kadindat Kepala Daerah pada saat melakukan melakukan kampanye harus dianggap sebagai proses perencanaan pembangunan;
2. Pendekatan teknokratik dimana perencanaan pembangunan harus menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah;
3. Pendekatan partisipatif yang masyarakat bahwa proses penyusunan perencanaan pembangunan harus melibatkan masyarakat sebagai pihak yang berkepentingan (Stakeholder) terhadap pembangunan;

4. Pendekatan Top Down yaitu bahwa penyusunan perencanaan pembangunan harus memperhatikan program–program jenjang pemerintah diatasnya;
5. Pendekatan Botom Up yaitu penyusunan perencanaan pembangunan harus memperhatikan kepentingan dan kebutuhan Stakeholder atau jenjang pemerintah dibawahnya, hasil proses penyusunan rencana pembangunan, diselaraskan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang.

Rencana Kerja Kecamatan MAUK Tahun 2025 disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, mengacu kepada Rancangan RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2025, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya. Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang Selanjutnya RENJA Perubahan dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan kemudian berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang Tahun 2025 adalah :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023;

11. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 31 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang;
12. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 33 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasngerang.
13. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 16 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang Tahun 2025 ini disusun untuk mewujudkan sinergitas antara perencnaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan Pembangunan maupun pelayanan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam Pembangunan daerah.

Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang Tahun 2025 adalah :

a. Menyediakan dokumen perencanaan tahunan Kecamatan Mauk Tahun 2025;
b. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2025
c. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Mauk Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA Perubahan Perangkat Daerah Tahun dan Capaian
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu – isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap Rancangan awal RKPD/RENSTRA
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan pencapaian kinerja Renstra Perangkat Daerah ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi capaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Perangkat Daerah, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Jenis program dan kegiatan yang direncanakan di dalam Renja Perubahan Kecamatan Mauk berdasarkan Renstra Kecamatan Mauk Tahun 2024-2026 yang terdiri dari 6 (enam) Program, dan 13 (tiga belas) Kegiatan. Review didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun – tahun sebelumnya, laporan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah, dan Perkiraan pelaksanaan DPA - Perangkat Daerah tahun berjalan yang baru disahkan.

Rencana Strategis Kecamatan Mauk Tahun 2024-2026 yang memuat indikator keberhasilan suatu proses perencanaan pembangunan untuk kurun waktu 3 (tiga) tahun, dijadikan tolak ukur untuk menilai sejauh mana perencanaan pembangunan telah dilaksanakan. Renstra tersebut merupakan panduan Kecamatan Mauk dalam melaksanakan program dan kegiatannya.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024, Kecamatan Mauk melaksanakan program dan kegiatan dengan dukungan anggaran bersumber dari APBD Kabupaten Tangerang, kemudian pada saat anggaran perubahan (APBD-P) tahun 2024 menjadi sebesar Rp 19.932.013.803,00 (Sembilan belas milyar sembilan ratus tiga puluh dua juta tiga belas ribu delapan ratus tiga rupiah), dengan Realisasi Anggaran sebesar Rp 19.679.511.998,00 (Sembilan belas milyar enam ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus sebelas ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) atau persentase realisasi sebesar 98,73%.

Adanya sisa anggaran tersebut dikarenakan adanya efisiensi dari berbagai kegiatan yang tidak semua terserap, antara lain pada sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, penyerapan anggaran pada sub kegiatan ini tidak mencapai 100% dikarenakan efisiensi anggaran yang disebabkan oleh proses penawaran pada saat pengadaan langsung dengan pihak ketiga. Selain itu, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, penyerapan anggaran pada sub kegiatan ini tidak tercapai 100% dikarenakan adanya penambahan anggaran pada belanja tagihan listrik sebagai antisipasi adanya penambahan tarif dasar listrik dan penambahan daya listrik kemudian direalisasikan sesuai dengan kebutuhan.

Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang pada Tahun Anggaran 2025 memiliki Pagu Murni sebesar Rp 20.494.391.880,00 (Dua puluh milyar empat ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah). Kemudian pada bulan Maret dilakukan efisiensi anggaran sesuai dengan INPRES Nomor 1 Tahun 2025 menjadi Rp. 20.589.171.337,00 (Dua puluh milyar lima ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah). Realisasi Anggaran sampai dengan Triwulan II tahun 2025 sebesar Rp.

9.936.576.320,00 (Sembilan milyar sembilan ratus tiga puluh enam juta lima ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus dua puluh rupiah) atau persentase realisasi sebesar 48,26%.

Diharapkan Realisasi Belanja tahun 2025 dapat tercapai dan dapat menyerap anggaran sesuai dana yang diberikan. Pada tahun 2025 sampai dengan Triwulan II secara keseluruhan program dan kegiatan serta sub kegiatan telah mencapai target dari Indikator Kinerja Utama Tahun 2025.

Fungsi evaluasi ini adalah dalam rangka penyediaan informasi yang berguna untuk menentukan strategi dan kegiatan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Mauk Tahun Anggaran 2025. Evaluasi atau reviu dilakukan terhadap realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Mauk Tahun 2025.

Keberhasilan pencapaian Visi dan Misi akan sangat dipengaruhi oleh tingkat kualitas sumberdaya manusia. Karena manusia sebagai subyek pelaku pembangunan yang sangat berperan dan menentukan baik sebagai perencana, pelaksana, pengguna maupun sebagai evaluator dari hasil kegiatan pembangunan. Dengan demikian tingginya tingkat kualitas sumber daya manusia para pelaku pembangunan (masyarakat, pemerintah maupun dunia usaha) sangat diperlukan dalam upaya mencapai tujuan pembangunan. Sesuai dengan tuntutan persaingan dan perkembangan dunia di era globalisasi dimana informasi terus berkembang peningkatan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Tangerang khususnya perlu diarahkan pada upaya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang diharapkan akan mampu tumbuh, berdaya tahan dan mampu bersaing serta tumbuhnya jiwa kewirausahaan. Disisi lain evaluasi hasil perencanaan tahun yang lalu akan menambah basis data untuk merencanakan program dan kegiatan selanjutnya.

Secara umum Rencana Kerja (RENJA Perubahan) Kecamatan Mauk Tahun 2025 memuat rencana program dan kegiatan dengan tetap memperhatikan potensi yang ada dalam rangka "***Mewujudkan Masyarakat Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang yang Religius, Cerdas, Sehat dan Sejahtera***". Keberhasilan suatu proses perencanaan akan bisa dilihat dari hasil evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya, sejauh mana pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan berdampak terhadap capaian yang telah ditetapkan di dalam Renstra SKPD, hasil dari evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan- kebijakan perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang. Pada tahun anggaran 2025 Kecamatan Mauk telah melaksanakan kegiatan yang menunjang tugas, pokok dan fungsinya telah menyelesaikan beberapa proses perencanaan pembangunan, yaitu:

1. Menyusun dokumen perencanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2025, mulai dari proses musrenbang tingkat desa, musrenbang tingkat kecamatan, forum SKPD dan Musrenbang Tingkat Kabupaten.
2. Menyusun Rencana Kerja SKPD, Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2023, pelaksanaan kinerja Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang ditunjang dengan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung yang terdiri dari Belanja Langsung Urusan SKPD dan Belanja Langsung Urusan Wajib dan Pilihan (Program), dengan ruang lingkup kegiatannya.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan II

KODE	PROGRAM/KEG/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEG/ SUB KEG	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN s/d TRIWULAN II		
			TARGET RENJA PD 2025	REALISASI RENJA PD 2025	TINGKAT REALISASI (%)
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan**	**100**	**20**	**20%**
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**2**	**2**	**100%**
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	2	100 %
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	**2**	**2**	**100 %**
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	2	100 %

7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah laporan keuangan**	**2**	**2**	**100 %**
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27	27	100 %
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2	2	100 %
7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah laporan pembinaan pegawai**	**2**	**1**	**80 %**
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Seragam Dinas	25	25	100 %
7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2	2	100 %
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah**	**2**	**1**	**80 %**
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15	15	100 %

7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10	10	100 %
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20	20	100 %
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	15	15	100 %
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2	2	100 %
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2	2	100 %
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2	2	100 %
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah laporan jasa penunjang**	**2**	**1**	**80 %**
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2	2	100 %
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2	2	100 %
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	**Jumlah\laporan pemeliharaan barang milik**	**2**	**1**	**80 %**

	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**daerah penunjang urusan pemerintahan**			
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4	4	100 %
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4	4	100 %
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5	5	100 %
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	2	100 %
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar**	**11.5**	**2**	**20 %**
		Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara	**100**	**20**	**20 %**
7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan**	**Jumlah laporan pelayanan**	**2**	**1**	**80 %**

	Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2	2	100 %
7.01.02.2.03	**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**	**Jumlah dokumen pemeliharaan**	**2**	**1**	**80 %**
7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	2	2	100 %
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Prosentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan**	**100**	**20**	**20 %**
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Jumlah laporan pemberdayaan**	**2**	**1**	**80 %**
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang	2	2	100 %

	dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2	2	100 %
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Jumlah laporan pemberdayaan Kelurahan**	**2**	**1**	**80 %**
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	jumlah laporan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2	2	100 %
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti**	**100**	**20**	**20 %**
7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Jumlah laporan gangguan trantibum**	**2**	**1**	**80 %**
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2	2	100 %
7.01.05	**PROGRAM**	**Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti**	**100**	**20**	**20 %**

	PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**Persentase tertib administrasi pemerintahan desa**	**90**	**20**	**20 %**
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Jumlah rekomendasi yang dikeluarkan**	**2**	**1**	**50 %**
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara	50	50	100 %
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	2	2	100 %
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa**	**100**	**20**	**20 %**
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan**	**jumlah kelompok masyarakat yang**	**10**	**2**	**20 %**

	Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**mendapatkan pembinaan/pemberdayaan**			
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	jumlah dokumen Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	2	2	100 %

Sumber Data : Kuarta dan Renstra 2024-2026

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dilakukan melalui : Penetapan Indikator Kinerja yaitu ukuran kuantitaf dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impact). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

Selanjutnya dilakukan Analisis Capaian Kinerja atas sasaran yang didasarkan atas hasil pengukuran kinerja kegiatan dalam suatu sasaran dilakukan analisis pencapaian kinerja atas sasaran tersebut. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja utama. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Kecamatan MAUK sebagai sebagai salah satu Perangkat Daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya tidak saja berurusan dengan aspek pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan administrasi Pemerintah Kecamatan semata melainkan juga merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat di tingkat Kecamatan. Oleh karenanya capaian kinerja pelayanannya lebih banyak dianalisis dari sudut pandang tugas pokok dan fungsi Kecamatan dan juga indikator kinerja output yang dihasilkan dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Tabel 2.2

NO	Indokator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Kerja		Target Capaian setiap Tahun			Kondisi Akhir
			2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	80.31	80.87	81.25	82.25	83.25	83.25
2	Nilai AKIP Kecamatan Mauk	Nilai	72.10	72.15	72.25	74.15	75.45	75.45

Sumber data : Renstra 2024-2026

Tabel 2.3

NO	Indikator	Target Capaian Setiap Tahun		
		2024	2025	2026
1	2	3	4	5
1	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	100%	100%	100%
2	Persentase pemenuhan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	89%	90%	92%

3	Persentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar Kecamatan Mauk	89.70%	89.80%	89.90%
4	Persentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik Kecamatan Mauk	93%	94%	95%
5	Persentase pemenuhan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	85%	87%	90%
6	Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	100%	100%	100%
7	Prosentase Program Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	100%

Sumber data : Renstra 2024-2026

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

1. Peningkatan profesionalisme kinerja aparatur pelayanan Kecamatan Mauk dalam memberikan pelayanan berkualitas kepada Masyarakat sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik ;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi di Kecamatan Mauk.
    a. Terbatasnya jumlah personil di Kecamatan Mauk sehingga menghambat penyelenggaraan tugas dan fungsi secara optimal
    b. Terbatasnya sarana dan prasarana sehingga dalam melaksanakan tugas pelayanan belum maksimal
    c. Belum terakomodirnya seluruh usulan-usulan Pembangunan di wilayah Kecamatan Mauk dalam APBD Kabupaten Tangerang
    d. Pembangunan Infrastruktur di Kecamatan Mauk sudah cukup baik, namun hal ini perlu ditingkatkan kualitas maupun kuantitasnya, khususnya untuk peningkatan jalan Kabupaten dan Pembangunan jalan desa yang sudah secara bertahap dilakuan Pembangunan melalui berbagai program Pembangunan.
3. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan, adalah ;
    a. Urusan Administrasi Pemerintahan

       Dalam perencanaan Pembangunan pada tahun anggaran 2024 telah dilaksanakan melalui Musrenbang, tetapi realisasinya jauh dari rencana yang diusulkan, dikarenakan ada beberapa program yang tidak sesuai dengan program RPJMD sehingga diperlukan rasionalisasi dan sinkronisasi lebih lanjut.

       Urusan Administrasi Pemerintahan mengakomodir kegiatan-kegiatan yang berada pada :
        1) Program pelayanan Administrasi perkantoran
        2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
        3) Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan

4) Program peningkatan perencanaan SKPD, dan
5) Program administrasi pemerintahan dan pelayanan umum di Kecamatan

b. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kecamatan Mauk senantiasa berusaha optimal dalam melaksanakan Pembangunan infrastruktur dasar kebutuhan Masyarakat, baik melalui pagu indikatif Kecamatan maupun pagu dan aspirasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Urusan perumahan rakyat dan Kawasan permukiman mengakomodir kegiatan-kegiatan yang berada pada :

1) Program penataan lingkungan permukiman perdesaan dan perkotaan, dan
2) Program peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana di Kecamatan.

c. Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta perlindungan Masyarakat

Ketentraman dan Ketertiban Umum merupakan kebutuhan dasar kehidupan keseharian masyarakat sehingga perlu dijaga secara berkesinambungan dengan meningkatkan peran serta masyarakat didalamnya.

Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat mengakomodir kegiatan-kegiatan yang berada pada :

1) Program Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ketertiban dan Ketentraman Umum, dan
2) Program Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan.

d. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Dinamika pembangunan menuntut adanya peningkatan kualitas sumberdaya manusia agar tidak tergerus oleh perkembangan jaman. Peningkatan kapasitas masyarakat dilaksanakan melalui berbagai kegiatan pembinaan dan pendampingan kelompokkelompok masyarakat agar bisa lebih produktif.

Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa mengakomodir kegiatan-kegiatan yang berada pada Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi di Kecamatan.

e. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Kecamatan MAUK berupaya secaya optimal untuk terus melakukan pembinaan-pembinaan terhadap organisasi kepemudaan terutama bagi Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra). Urusan Kepemudaan dan Olahraga mengakomodir kegiatankegiatan yang berada pada Program Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Potensi Kepemimpinan, Kewirausahaan serta Kepeloporan Pemuda.

Struktur organisasi Kecamatan MAUK berdasarkan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 113 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas, dan Fungsi serta tata kerja kecamatan

dan kelurahan di lingkungan pemerintah Kecamatan MAUK terdiri dari Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris Daerah. Kecamatan merupakan perangkat daerah dengan Kecamatan Tipe A.

Camat dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh perangkat kecamatan. Perangkat kecamatan terdiri dari:

1. Sekretariat;
2. Seksi; dan
3. Kelurahan

Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari:

1. Camat
2. Sekertaris Camat
   a. Sub bagian Umum dan Kepegawaian, dan
   b. Sub bagian Perencanaan dan Keuangan
3. Seksi Pemerintahan
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
5. Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat
6. Seksi Pelayanan Umum
7. Seksi Pembinaan dan Pengawasan
8. Kelompok Jabatan Fungsional

1. Camat

Kecamatan di pimpin oleh Camat yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati Tangerang melalui Sekretaris Daerah. Dalam menjalankan tugas dan fungsi tersebut Camat dibantu oleh 1 (satu) Sekretaris Kecamatan dan 5 (lima) Kepala Seksi dengan tugas dan fungsi sebagai berikut :

Camat mempunyai tugas :

a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
g. Membina dan mengawasai penyelenggaraan kegiatan Desa dan Kelurahan;
h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan; dan; dan
i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaan tugas , Camat mempunyai fungsi :

a. Penyiapan rumusan kebijakan teknis pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan, penyelenggaraan kegiatan Desa dan Kelurahan, dan

pelayanan publik yang menjadi ruang lingkup tugasnya di Kecamatan;

b. Penyiapan rencana dan program kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan, penyelenggaraan kegiatan Desa dan Kelurahan, dan pelayanan publik yang menjadi ruang lingkup tugasnya di Kecamatan;
c. Penyiapan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan, penyelenggaraan kegiatan Desa dan Kelurahan, dan pelayanan publik yang menjadi ruang lingkup tugasnya di Kecamatan;
d. Penyiapan pengawasan dan pengendalian kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan, penyelenggaraan kegiatan Desa dan Kelurahan, dan pelayanan publik yang menjadi ruang lingkup tugasnya di Kecamatan;
e. Penyiapan bimbingan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan, penyelenggaraan kegiatan Desa dan Kelurahan, dan pelayanan publik yang menjadi ruang lingkup tugasnya di Kecamatan;
f. Pengelolaan administrasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan, penyelenggaraan kegiatan Desa dan Kelurahan, dan pelayanan publik yang menjadi ruang lingkup tugasnya di Kecamatan;

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (b) camat mempunyai rincian tugas:

a. Merencanakan perumusan kebijakan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang

dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan, penyelenggaraan kegiatan Desa dan Kelurahan, dan pelayanan publik yang menjadi ruang lingkup tugasnya di Kecamatan;

b. Membagi tugas program pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan, penyelenggaraan kegiatan Desa dan Kelurahan, dan pelayanan publik yang menjadi ruang lingkup tugasnya di Kecamatan;
c. Memberi petunjuk program pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan, penyelenggaraan kegiatan Desa dan Kelurahan, dan pelayanan publik yang menjadi ruang lingkup tugasnya di Kecamatan;
d. Mengatur program pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan, penyelenggaraan kegiatan Desa dan Kelurahan, dan pelayanan publik yang menjadi ruang lingkup tugasnya di Kecamatan;
e. Mengevaluasi kegiatan program pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan, penyelenggaraan kegiatan Desa dan Kelurahan, dan pelayanan publik yang menjadi ruang lingkup tugasnya di Kecamatan;
f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Camat mendapatkan pelimpahan/pendelegasian sebagian kewenangan Bupati untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas pelimpahan/pendelegasian sebagian kewenangan Bupati sebagaimana dimaksud diatur dengan Peraturan Bupati.

2. **Sekertaris Camat**, membawahi :
    a. Sub. Bagian Perencanaan dan Keuangan
    b. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian

Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada camat. Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pembinaan daan pengendalian kegiatan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan program kerja, keuangan, serta pengkoordinasian tugassatuan organisasi di lingkungan kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Kecamatan mempunyai fungsi:

a. Penyiapan rumusan kebijakan teknis pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, Perencanaan dan Keuangan, pengelolaan perencanaan program kerja kecamatan, evaluasi dan pelaporan;
b. Penyiapan rencana dan program pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, Perencanaan dan Keuangan, perencanaan program kerja kecamatan, evaluasi dan pelaporan;
c. Penyiapan pengendalian pelaksanan urusan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, Perencanaan dan keuangan, perencanaan program kerja kecamatan, evaluasi dan pelaporan;
d. Penyiapan bimbingan pelaksanaan urusan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, Perencanaan dan keuangan, perencanaan program kerja kecamatan, evaluasi dan pelaporan;
e. Pengelolaan administrasi urusan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, Perencanaan dan Keuangan, perencanaan program kerja kecamatan, evaluasi dan pelaporan;

Dalam melaksanakan fungsi, Sekretaris Kecamatan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

a. Merencanakan perumusan kebijakan penyusunan Rencana Srategis (Renstra) dan Rencana Kerja (RENJA Perubahan) Kecamatan serta perumusan bahan kebijakan program yang terkait dengan umum dan kepegawaian serta perencanaan dan keuangan ;
b. Membagi tugas program yang terkait dengan umum dan kepegawaian serta perencanaan dan keuangan;
c. Memberi petunjuk program yang terkait dengan umum dan kepegawian, serta perencanaan dan keuangan;
d. Memberi petunjuk program;
e. Mengatur program setiap satuan organisasi (kepala seksi dan lurah) di lingkungan kecamatan dalam perencanaan program, pelaksanaan kegiatan, evalusi dan pelaporan, umum dan kepegawaian serta perencanaan dan keuangan;
f. Mengatur program yang terkait dengan umum dan kepegawaian meliputi mengevaluasi kebutuhan pegawai, perlengkapan, prasarana dan sarana di kecamatan, mengatur jumlah seluruh pelaksana kecamatan untuk ditempatkan pada setiap unit kerja sesuai kebutuhan dan keahlian,
g. Mengatur program yang terkait dengan umum dan kepegawaian meliputi memelihara, mendayagunakan serta mendistribusikan prasarana dan sarana di lingkungan kecamatan agar efektif, mengatur administrasi umum dan kepegawaian kecamatan serta aset daerah di lingkungan tugasnya, mengatur surat menyurat,

kearsipan, perjalanan dinas dan perlengkapan, urusan rumah tangga dan informasi kehumasan

h. Mengatur program yang terkait dengan perencaan dan keuangan yang meliputi : menyelenggarakan administrasi keuangan dan penatausahaan keuangan kecamatan di lingkungan tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

i. Mengevaluasi kegiatan program satuan organisasi (kepala seksi dan lurah) di lingkungan kecamatan dalam perencanaan program, pelaksanaan kegiatan, evalusi dan pelaporan, umum dan kepegawaian serta perencanaan dan keuangan dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;

j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsi

1) Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub bagian umum dan kepegawian sebagaimana dipimpin oleh kepala subbagian umum dan kepegawaian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada sekretaris kecamatan. Subbagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas melakukan kegiatan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, kerumahtanggaan, dan kehumasan di lingkungan kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas, subbagian umum dan kepegawian mempunyai rincian tugas:

a) Merencanakan kegiatan umum dan kepegawaian program kerja operasional pelayanan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, kerumahtanggaan, dan informasi kehumasan di kecamatan;

b) membimbing pelaksanaan kegiatan umum yang meliputi : surat menyurat, penggandaan, pengiriman, pengarsipan, tata naskah dinas, Inventarisasi Aset dan Persediaan Pengadaan barang dan jasa, Pendistribusian, Stock Opname, fasilitasi pengelola informasi dan dokumen (PID), perjalanan dinas dan pemeliharaan barang-barang Inventaris ;

c) membimbing pelaksanaan kegiatan kepegawaian meliputi : layanan administrasi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala (KGB), Daftar Urut Kepangkatan (DUK), data pegawai, Katu Pegawai (karpeg), Karis/Karsu, tunjangan anak/keluarga dan jabatan, asuransi kesehatan, tabungan pensiun, tabungan perumahan, pensiun, usulan formasi pegawai, usulan izin belajar, usulan diklat pegawai, usulan pemberian penghargaan dan tanda kehormatan, penilaian angka kredit jabatan fungsional, teguran disiplin pegawai, usulan cuti pegawai, usulan perpindahan/cuti pegawai, pengelolaan standar kompetensi pegawai (SKP).

d) Membimbing pelaksanaan kegiatan umum dan kepegawaian yang meliputi : pembinaan dan pengembangan pegawai kecamatan, pembinaan dan supervisi pengelolaan dan pendayagunaan aset daerah yang dikelola oleh kelurahan, urusan rumah tangga dan informasi kehumasan di kecamatan

e) Membagi tugas pelaksanaan kegiatan umum meliputi : surat menyurat, penggandaan, pengiriman, pengarsipan, tata naskah dinas, Inventarisasi Aset dan Persediaan Pengadaan barang dan jasa, Pendistribusian, Stock Opname, fasilitasi

pengelola informasi dan dokumen (PID), perjalanan dinas dan pemeliharaan barang-barang Inventaris

f) membagi tugas pelaksanaan pelayanan administrasi kepegawian di lingkup kecamatan yang meliputi layanan administrasi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala (KGB), Daftar Urut Kepangkatan (DUK), data pegawai, Kartu Pegawai (karpeg), Karis/Karsu, tunjangan anak/keluarga dan jabatan, asuransi kesehatan, tabungan pensiun, tabungan perumahan, pensiun, usulan formasi pegawai, usulan izin belajar, usulan diklat pegawai, usulan pemberian penghargaan dan tanda kehormatan, penilaian angka kredit jabatan fungsional, teguran disiplin pegawai, usulan cuti pegawai, usulan perpindahan/cuti pegawai, pengelolaan standar kompetensi pegawai (SKP);
g) mengevaluasi pelaksanaan kegiatan umum dan kepegawaian dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya;
h) membuat laporan pelaksanaan kegiatan umum dan kepegawaian yang meliputi : laporan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang, administrasi aset daerah di lingkup kecamatan, penilaian prestasi kerja pegawai kecamatan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;
i) melaksanakan tugas kedinasan lain yang dierikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya .

2) Sub. Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub bagian perencanaan dan keuangan dipimpin oleh kepala subbagian perencanaan dan keuangan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada sekretaris kecamatan. Subbagian perencanaan dan keuangan mempunyai tugas melakukan kegiatan penyusunan rencana dan program kerja kecamatan, serta pengelolaan administrasi dan pengelolaan keuangan kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas, kepala subbagian perencanaan dan keuangan mempunyai rincian tugas:

a) merencanakan kegiatan Perencanaan dan keuangan;
b) membimbing pelaksanaan kegiatan perencanaan yang meliputi : RPJMD, Rencana Strategis, Rencana Kerja, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja, Penyusunan Dokumen RKA/DPA, RRKA/DPPA, Forum SKPD, Monitoring dan Evaluasi, pelaksanaan pengembangan e-goverment, serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. melakukan pengoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan kecamatan meliputi Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (RENJA Perubahan), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), dan Penetapan Kinerja (PK);
c) membimbing pelaksanaan kegiatan administrasi keuangan yang meliputi : Pengajuan Surat Membayar Uang Persediaan, Ganti Uang, Tambahan Uang, LS Bendahara, LS Pihak Ketiga dan Ganti Uang Nihil, Pencairan, Pencatatan, Pembukuan, serta Pelaporan Pertanggungjawaban Anggaran;
d) membagi tugas pelaksanaan kegiatan administrasi perencanaan yang meliputi : RPJMD, Rencana Strategis, Rencana Kerja, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja,

Penyusunan Dokumen RKA/DPA, RRKA/DPPA, Fasilitasi Perencanaan SKPD, Monitoring dan Evaluasi, e-Reporting, Reviu Penyerapan Anggaran, Data Pembangunan SKPD serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

e) membagi tugas pelaksanaan kegiatan administrasi keuangan yang meliputi : Pengajuan Surat Membayar Uang Persediaan, Ganti Uang, Tambahan Uang, LS Bendahara, LS Pihak Ketiga dan Ganti Uang Nihil, Pencairan, Pencatatan, Pembukuan, serta Pelaporan Pertanggungjawaban Anggaran;
f) mengevaluasi pelaksanaa kegiatan yang terkait dengan perencanaan dan keuangan dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya;
g) membuat laporan pelaksanaan kegiatan perencanaan dan keuangan yang meliputi : Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK), dan RPJMD, Rencana Strategis, Rencana Kerja, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja, Penyusunan Dokumen RKA/DPA, RRKA/DPPA, Fasilitasi Perencanaan SKPD, Monitoring dan Evaluasi, e-Reporting, Reviu Penyerapan Anggaran, Data Pembangunan SKPD, pelaksanaan pengembangan e-goverment serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
h) melaksanakan tugas kedinasana lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Seksi Pemerintahan

Seksi pemerintahan dipimpin oleh kepala seksi pemerintahan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada camat melalui sekretaris kecamatan. Seksi pemerintahan mempunyai tugas melakukan penyusunan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan umum, pengoordinasian kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan, serta pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa dan kelurahan.

Dalam melaksanakan tugas, kepala seksi pemerintahan mempunyai rincian tugas:

a) merencanakan kegiatan pemerintahan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
b) membimbing pelaksanaan kegiatan pemerintahan umum yang meliputi : pengelolaan profil dan monografi desa/kelurahan serta kecamatan, perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, penyusunan peraturan Desa dan peraturan kepala Desa;
c) membimbing pelaksanaan kegiatan fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi tata pemerintahan desa dan kelurahan, fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa, fasilitasi pelaksanaan tugas kepala Desa/lurah dan perangkat desa/kelurahan, fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala Desa, fasilitasi

pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa, fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan, memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif di desa dan kelurahan, memfasilitasi kerja sama antar-Desa dan kerja sama Desa dengan pihak ketiga.

d) Membagi tugas pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan pemerintahan umum.
e) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pemerintahan umum yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa), Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa);
f) membuat laporan pelaksanaan kegiatan pemerintahan umum;
g) pengumpulan bahan untuk camat merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa ;
h) mengumpulkan bahan dan melaksanakan kebijakan camat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan/didelegasikan bupati kepada camat sesuai dengan lingkup tugasnya
i) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi pemberdayaan masyarakat dipimpin oleh kepala seksi pemberdayaan masyarakat berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan. Seksi pemberdayaan masyarakat mempunyai tugas melakukan penyusunan kegiatan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial di kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas, kepala seksi pemberdayaan masyarakat mempunyai rincian tugas:

a) Merencanakan kegiatan yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat; Membimbing pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat yang melputi : fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa dan kelurahan,
b) Membimbing pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan,
c) Membimbing pelaksanaan kegiatan penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah penyakit skala kecamatan, masalah pencemaran lingkungan, serta masalah kesejahteraan sosial di kecamatan dan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah/instansi terkait,
d) Membagi tugas pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan pemberdayaan Masyarakat,
e) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya,

f) Membuat laporan pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan pemberdayaan Masyarakat,
g) Mengumpulkan bahan dan melaksanakan kebijakan camat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan/didelegasikan bupati kepada camat sesuai dengan lingkup tugasnya,
h) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya

5. Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat

Seksi ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat dipimpin oleh kepala Seksi ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan. Seksi ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat mempunyai tugas melakukan penyusunan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, serta penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas, kepala seksi ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat mempunyai rincian tugas:

a) Merencanakan kegiatan yang terkait dengan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat ;membimbing pelaksanaan kegiatan tanggap bencana lingkup kecamatan,
b) membimbing pelaksanaan kegiatan fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di desa dan kelurahan, membimbing anggota Linmas yang berada di wilayah kerja kecamatan ;
c) Membimbing pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan yang meliputi koordinasi dengan kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia, serta pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan;
d) Membagi tugas pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat di desa dan kelurahan ;
e) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya.;
f) Membuat laporan pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat;
g) Mengumpulkan bahan dan melaksanakan kebijakan camat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan/didelegasikan bupati kepada camat sesuai dengan lingkup tugasnya;
h) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

6. Seksi Pelayanan Umum Publik

a) Seksi pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g dipimpin oleh kepala seksi pelayanan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan;
b) Seksi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan penyususnan kegiatan

pelayanan publik lingkup bidang perizinan dan non perizinan sesuai dengan kewenangan kecamatan;

c) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepala seksi pelayanan mempunyai rincian tugas:
   1) Merencanakan kegiatan yang terkait dengan pelayanan ;
   2) Membimbing pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan
   3) Membimbing pelaksanaan kegiatan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan, pendistribusian dan pengumpulan formulir pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat yang berasal dari Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan pelayanan public
   4) Membimbing penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi terkait lainnya
   5) Membimbing pelaksanakan standar pelayanan publik dan standar operasioanal prosedur pelayanan, pengaduan/keluhan dari masyarakat;
   6) Membagi tugas pelaksanaan program kegiatan yang terkait dengan pelayanan;
   7) Membuat laporan pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan pelayanan;
   8) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan pelayanan dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya yang meliputi evaluasi terhadap kinerja pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
   9) Mengumpulkan bahan dan melaksanakan kebijakan camat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan/didelegasikan bupati kepada camat sesuai dengan lingkup tugasnya ;
   10) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

7. Seksi Pembinaan dan Pengawasan

Tugas dan fungsi Pembinaan dan Pengawasan di Kecamatan berperan dalam fasilitasi penyusunan peraturan Desa, pengelolaan keuangan Desa, dan pelaksanaan tugas Kepala Desa serta perangkat Desa.

Tugas dan fungsi Binwas sebagai berikut :

a) Menyusun rencana kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.
b) Memberikan bimbingan dan arahan kepada pemerintah desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, termasuk dalam penyusunan peraturan desa, pengelolaan keuangan, dan pelaksanaan program pembangunan.
c) Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa untuk memastikan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan dan standar yang berlaku.
d) Membantu pemerintah desa dalam berbagai hal, seperti penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif, kerjasama antar desa, dan penataan wilayah desa.

e) Mengkoordinasikan kegiatan pembinaan dan pengawasan dengan berbagai pihak terkait, termasuk instansi pemerintah daerah dan lembaga kemasyarakatan.
f) Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan kepada atasan (Camat).
g) Melalui pembinaan dan pengawasan yang dilakukan, Binwas bertujuan untuk meningkatkan kualitas pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
h) Binwas berperan dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa.
i) Binwas membantu menyelaraskan perencanaan pembangunan desa dengan perencanaan pembangunan daerah.
j) Binwas berperan dalam mencegah terjadinya penyimpangan dan menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
k) Dengan adanya pembinaan dan pengawasan, Binwas juga berperan dalam meningkatkan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan dan aset desa.

8. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional terdiri dari beberapa jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang tugasnya.

Kelompok jabatan fungsional dalam pelaksanaan tugas pokok berpedoman kepada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. bertugas sebagai pelaksanaan kegiatan kecamatan sesuai dengan kebutuhan.

Kelompok jabatan fungsional dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada camat.

Setiap jenis jabatan fungsional di koordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang di tunjuk di antara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Badan/Dinas Kelompok jabatan fungsional dalam pelaksanaan tugasnya dikoordinasikan oleh tenaga fungsional. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.4 Review Terhadap Rancangan RKPD Perubahan

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Mauk Tahun 2025 merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam arah kebijakan RPJPD Kabupaten Tangerang tahun 2024-2026 yang dijabarkan dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026. Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Kecamatan Mauk Tahun 2025 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017.

Dalam konteks perencanaan pembangunan, Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan, melayani/memenuhi kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, dalam era globalisasi, Kecamatan Mauk dituntut untuk siap dan sanggup membuat/menyusun suatu perencanaan yang baik, sehingga mampu meningkatkan

kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Untuk lebih jelasnya mengenai review rancangan RKPD Perubahan Tahun 2025 dapat dilihat tabel berikut ini

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan RKPD Perubahan Tahun 2025
Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang

NO	Rancangan RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu	Program Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	KECAMATAN MAUK				16.030.159.470	KECAMATAN MAUK				21.362.264.194	
	UNSUR KEWILAYAHAN				16.030.159.470	UNSUR KEWILAYAHAN				21.362.264.194	
	KECAMATAN				16.030.159.470	KECAMATAN				21.362.264.194	
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan**	**100%**	**6.427.932.570**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**		**Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan**	**100%**	**9.736.268.868**	
1.1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**2**	**313.200.000**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**2**	**111.994.070**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	151.200.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	27.144.070	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian	2	108.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	24.432.000	

			Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	54.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	60.148.000	
1.2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**2**	**5.551.155.570**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**2**	**7.170.527.294**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12	5.423.067.570	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12	7.144.352.294	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan a n/Semesteran SKPD	2	128.088.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	2	26.175.000	
1.3	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**			**0**	**0**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**			**0**	**0**	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	0	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	0	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan	40	0	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	40	0	

			Perundang-Undangan								
1.4	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Derah**		**169.300.000**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Derah**		**341.405.800**	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	0	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10	0	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10	0	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	14	58.900.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	14	177.381.800	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	15	12.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	15	16.941.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2	0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2	60.000.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2	76.800.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2	59.025.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2	21.600.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2	28.058.000	
1.5	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Jumlah Laporan Jasa Penunjang Urusan**		**394.277.000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Jumlah Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**4.575.970.568**	

			Pemerintahan Daerah								
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	140.277.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	140.277.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2	254.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2	1.435.693.568	
1.5	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**0**	**0**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**0**	**536.371.136**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4	130.034.976	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4	89.686.160	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6	0	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6	16.650.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	2	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	300.000.000	

			Dipelihara/Direhabilitasi								
2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**				**8.338.626.900**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**				**10.031.466.866**	
2.1	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**				**291.685.000**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**				**522.524.600**	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2	14.847.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2	25.476.600	
2.2	**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**				**8.046.941.900**	**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**				**9.509.942.266**	
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum		Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	2	7.359.549.900	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum		Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	2	7.475.244.790	
3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN**				**842.400.000**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN**				**1.181.105.550**	

	MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					**MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					
3.1	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**				**842.400.000**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**				**1.181.105.550**	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	4	32.400.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	4	64.755.750	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2	810.000.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2	1.116.349.800	
4	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**				**194.400.000**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**				**148.074.800**	
4.1	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**				**194.400.000**	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**				**148.074.800**	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2	194.400.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2	72.334.800	

5	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**				**118.800.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**				**191.095.110**	
5.1	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**		**Jumlah Orang yang mengikuti pembinaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**100%**	**118.800.000**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**		**Jumlah Orang yang mengikuti pembinaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**100%**	**191.095.110**	
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	50	54.000.000	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	50	143.644.220	
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi	2	64.800.000	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi		Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	2	47.450.890	

			Pimpinan di Kecamatan			Pimpinan di Kecamatan					
6	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**				**108.000.000**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**				**74.253.000**	
6.1	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**				**108.000.000**	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**				**74.253.000**	
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	2	108.000.000	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	2	74.253.000	

NO	Rancangan RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu	Program Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	KELURAHAN MAUK TIMUR				16.030.159.470	KECAMATAN MAUK				21.362.264.194	
	UNSUR KEWILAYAHAN				16.030.159.470	UNSUR KEWILAYAHAN				21.362.264.194	
	KECAMATAN				16.030.159.470	KECAMATAN				21.362.264.194	
1	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**				**8.338.626.900**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**				**10.031.466.866**	
1.1	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang**				**291.685.000**	**Penyelenggaraan Urusan**				**522.524.600**	

	Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan					**Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**					
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2	276.838.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2	497.048.000	
1.2	**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**				**8.046.941.900**	**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**				**9.508.942.266**	
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum		Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	2	688.392.000	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum		Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	2	2.033.697.476	
2	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**				**194.400.000**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**				**148.074.800**	
2.1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				194.400.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				148.074.800	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan	2	0	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan	2	75.740.000	

	Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

1. Bahwa usulan program/kegiatan yang dibahas di dalam Musrenbang mekanismenya diawali dari penggalian gagasan yang melibatkan unsur tokoh masyarakat, tokoh pemuda, unsur perempuan dan organisasi kemasyarakat sehingga menghasilkan usulan program yang dibawa ke Musrenbang desa
2. Musrenbang Desa menghasilkan skala prioritas usulan tingkat Desa selanjutnya ditunjuk perwakilan dari Desa/Kelurahan untuk mengawal usulan tersebut di Forum Kecamatan
3. Hasil Musrenbang Kecamatan merupakan skala prioritas program yang telah sesuai dengan kebutuhan real masyarakat serta isu-isu penting dari skteholder yang akan diselaraskan dengan rencana program dan kegiatan pada Rencana Strategi Kecamatan Mauk.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan Daerah yang menjadi tolak ukur dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Kecamatan Mauk adalah berdasarkan pada :

1. Misi Keempat, yaitu Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan dan akuntabel dengan strategi Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kecamatan melalui kebijakan Meningkatkan pelayanan Paten Kecamatan dan Kelurahan.
2. Misi keenam, yaitu mengembangkan inovasi daerah dalam rangka meningkatkan kualitas daya saing daerah, Masyarakat dan pelaku Pembangunan lainnya dengan strategi meningkatkan inovasi OPD melalui kebijakan meningkatkan implementasi inovasi OPD.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja

Untuk merealisasikan misi, tujuan serta sasaran RPJMD tersebut perlu ditetapkan tujuan dan sasaran Kecamatan MAUK Kabupaten Tangerang dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap Urusan baik urusan wajib maupun urusan pilihan yang dilakukan oleh Kecamatan MAUK Kabupaten Tangerang. Sedangkan Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan.

Tujuan Kecamatan MAUK Tahun 2025 adalah :

1. Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Berkualitas;
2. Meningkatkan Kinerja Inovasi Perangkat Daerah, dan
3. Meningkatkan Kinerja Perangkat Daerah

Adapun Sasaran Kecamatan Mauk Tahun 2025 adalah :

1. Meningkatnya Pelayanan Masyarakat serta meningkatnya Desa/Kelurahan dengan status berkembang;
2. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Dasar Masyarakat dan Lingkungan Hidup;
3. Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum;
4. Meningkatnya Upaya Pemberdayaan Masyarakat;
5. Meningkatnya Inovasi Kecamatan, dan
6. Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah.

3.3 Program dan Kegiatan

Arah kebijakan Pembangunan di Kecamatan MAUK diarahkan Kepada :

1. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pelayanan Pendidikan dan Kesehatan di tingkat Kecamatan;
2. Meningkatkan peran aktif dan Kontrol masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan untuk mencapai hasil yang diharapkan;
3. Meningkatkan pengawasan dan monitoring serta evaluasi program kegiatan yang telah direncanakan;
4. Meningkatkan hubungan kerja dengan seluruh lembaga pemerintah maupun non pemerintah;
5. Meningkatkan kinerja petugas pelayanan dengan SDM yang handal untuk mencapai pelayanan masyarakat yang maksimal;

6. Peningkatan transparansi, partisipasi dan mutu pelayanan melalui peningkatan akses dan sebaran informasi;

Rencana Kerja Perubahan disajikan bersama indikator kinerja, sedangkan program disajikan dengan mengacu kepada program yang relevan, sehingga rencana kerja merupakan rincian yang sistematis dari program yang akan dilaksanakan oleh indikator kinerja kegiatan, Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang Tahun 2025 sebagaimana tabel dilembaran berikut :

Table 3.1

Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Pagu Anggaran
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA**	**Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan**	**100**	**9.468.961.725**
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**2**	**111.994.070**
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	27.144.070
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	24.432.000
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	60.418.000
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah laporan keuangan**	**2**	**6.980.020.151**
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27	6.953.845.151
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah Laporan Keuangan	2	26.175.000

	Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah**	**2**	**341.405.800**
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15	0
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10	0
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20	177.381.800
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	15	16.941.000
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2	60.000.000
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2	59.025.000
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2	28.058.000
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan**	**2**	**536.371.136**
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	4	130.034.976

		dibayarkan Pajaknya		
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4	89.686.160
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5	16.650.000
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	300.000.000
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar**	**11.5**	**7.014.135.676**
		Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara	**100**	
7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Jumlah laporan pelayanan**	**2**	**25.476.600**
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2	25.476.600
7.01.02.2.03	**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**	**Jumlah dokumen pemeliharaan**	**2**	**6.988.659.076**
7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	2	6.988.659.076

7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Prosentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan**	**100**	**1.181.105.550**
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Jumlah laporan pemberdayaan**	**2**	**1.181.105.550**
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	2	64.755.750
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2	1.116.349.800
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Jumlah laporan pemberdayaan Kelurahan**	**2**	**0**
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	jumlah laporan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2	0
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti**	**100**	**72.334.800**
7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Jumlah laporan gangguan trantibum**	**2**	**72.334.800**
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2	72.334.800
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti**	**100**	**191.095.110**
		Persentase tertib administrasi pemerintahan desa	**90**	
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan**	**Jumlah rekomendasi yang**	**2**	**191.095.110**

	Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**dikeluarkan**		
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara	50	143.644.220
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	2	47.450.890
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa**	**100**	**74.253.000**
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan/pemberdayaan**	**10**	**74.253.000**
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	jumlah dokumen Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	2	74.253.000

Dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan, Kecamatan Mauk sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang merupakan upaya-upaya khusus untuk melaksanakan serangkaian tindakan dalam mencapai tujuan dan sasaran, disamping itu juga kinerja pelayanan Kecamatan Teluknaga merupakan bagian integritas dalam proses perencanaan strategis pemerintah, guna terlaksanannya dan tercapainya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, maka sangat perlu sekali adanya program dan kegiatan yang akan dilaksanakan disuatu unit kerja serta dapat dipertanggung jawabkan dalam realisasi pelaksanaannya. Sejalan dengan hal tersebut diatas Kami menyadari bahwa dalam

melaksanakan program dan kegiatan tersebut masih mengalami hambatan karena keterbatasan sarana dan prasarana pendukung serta kurangnya personil.

Rencana tindaklanjut Kecamatan Mauk pada tahun 2026 mendatang akan menetapkan 6 program, 13 kegiatan sesuai dengan program nasional yang dilaksanakan sesuai APBD-P tahun 2025, Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Teluknaga tahun 2025 merupakan dokumen rencana kerja Perubahan yang berfungsi sebagai pedoman perencanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan 1 (satu) Semester kedepan.

BAB IV
PENUTUP

Dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, maka diharapkan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang Tahun 2025 dapat digunakan sebagai pedoman kerja bagi aparatur Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang sesuai dengan Visi dan Misi yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.

Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2025, Rencana Kerja (RENJA) Perubahan juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang. Rencana Kerja (RENJA) Perubahan juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para Pimpinan dan seluruh staf Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang Tahun 2025 adalah Dokumen Perencanaan Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2025, RENJA Perubahan ini diharapkan mampu menjadi acuan dan pedoman Penyelenggaraan Program dan Kegiatan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang pada tahun 2025 agar sesuai dengan Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan yang ditetapkan.

Dengan adanya RENJA Perubahan Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan.

Melalui Rencana Kerja (RENJA) Perubahan ini diharapkan agar setiap aparatur yang mendukungnya, mampu melakukan evaluasi dan instrospeksi guna meningkatkan capaian kinerja yang lebih baik melalui upaya memahami tugas dan meningkatkan pelaksanaannya dengan penuh tanggungjawab dan kerja keras. Akhir kata, Semoga Rencana Kerja (RENJA) Perubahan tahun 2025 ini dapat bermanfaat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

42. Kecamatan Rajeg

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 272-273, Rencana Kerja yang selanjutnya disingkat dengan Renja memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dalam Permendagri No 86 Tahun 2017 Pasal 1 ayat 29, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Renja PD) merupakan dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 *(satu)* tahun.

Renja Kecamatan Rajeg Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan bersifat teknis operasional yang menjabarkan Renstra Kecamatan Rajeg Tahun 2024-2026, serta merupakan Rancangan Rencana Kerja Kecamatan Rajeg Tahun 2025 dengan juga mengacu kepada Tema RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2025 yaitu "PEMERATAAN PEMBANGUNAN BERWAWASAN LINGKUNGAN DALAM UPAYA PENINGKATAN DAYA SAING DAERAH MELALUI KOLABORASI ANTAR SEKTOR". Oleh karena itu, Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Rajeg diharapkan dapat mendukung dokumen Renstra Kecamatan Rajeg periode 2024-2026 serta mendukung Tema RKPD yang sudah ditentukan.

Renja Kecamatan Rajeg menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahunnya dalam 1 *(satu)* tahun anggaran. Renja Kecamatan Rajeg juga menjadi acuan dalam mengendalikan dan mengevaluasi pembangunan pada lingkungan Kecamatan Rajeg. Selain itu, Renja berperan sangat penting dalam menuntun Perangkat Daerah untuk berkonstribusi mewujudkan cita-cita dan tujuan pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengoptimalkan penggunaan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh daerah. Renja Kecamatan Rajeg berkontribusi dalam mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Tangerang berkaitan dengan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, serta Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.

Dalam menyusun Renja Kecamatan Rajeg terdapat beberapa proses yang harus ditempuh yaitu dari persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah, penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah, penyusunan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah, hingga penetapan Renja Perangkat Daerah. Selain itu, dokumen Renja memiliki keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan, antara lain RPD, Renja/Resntra K/L dan Renja/Resntra provinsi/kabupaten/kota, dan Renja/Resntra Perangkat Daerah. Keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan RPD, Renja/Resntra K/L dan Renja/Resntra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja/Resntra Perangkat Daerah tersebut berupa tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Kabupaten, Peraturan Kepala Daerah Kabupaten tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, RPD Kabupaten dan memperhatikan Renja Kementerian/Lembaga, Renja PerangkatDaerah

Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Tangerang.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatar belakangi penyusunan RKPD Tahun 2025 Kabupaten Tangerang adalah:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang_undang Nomor 4 Tahun 1968 Tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 632);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
19. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
20. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
21. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

23. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara perencanaan, pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daearah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O17 Nomor 1312);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 14);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
30. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru;
31. Permendagri Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.
32. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentangRencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 26);
33. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten 2010-2030;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2008 Nomor 01, Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0108);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2009 Nomor 02, Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0209);

36. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 09 Tahun 2009 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2009 Nomor 12);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2016 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2016 Nomor 1611);
39. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah;
40. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 33 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2023 Nomor 33).
41. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 20 Tahun 2025 tentang perubahan atas peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja dimaksudkan sebagai arahan dan pedoman bagi Perangkat Daerah untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Untuk itu maksud disusunnya Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

a) Memberikan acuan resmi bagi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang sekaligus menjadi acuan dalam menentukan program dan kegiatan tahunan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Kabupaten;
b) Menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu tiga tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah;
c) Menjabarkan gambaran tentang kondisi Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang;
d) Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
e) Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah untuk memahami, menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu tiga tahunan;

f) Mengetahui apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan organisasi guna mendukung dan memenuhi tujuan dan sasaran untuk 1 *(satu)* tahun anggaran;
g) Menyesuaikan Perubahan pada RPD Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026.

Adapun tujuan penyusunan dokumen Renja, antara lain adalah :
a) Menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yaitu untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang dan mewujudkan cita-cita yang ingin dicapai dalam 1 *(satu)* tahun anggaran sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab yang diemban Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang;
b) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama 1 *(satu)* tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung tujuan dan sasaran kepala daerah;
c) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah selama 1 *(satu)* tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah;
d) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu 1 *(satu)* tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Bab I. PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

Bab II. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Bab IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
- 4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab V. PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Keberhasilan pencapaian Visi dan Misi akan sangat dipengaruhi oleh tingkat kualitas sumberdaya manusia. Karena manusia sebagai subyek pelaku pembangunan yang sangat berperan dan menentukan baik sebagai perencana, pelaksana, pengguna maupun sebagai evaluator dari hasil kegiatan pembangunan. Dengan demikian tingginya tingkat kualitas sumber daya manusia para pelaku pembangunan (masyarakat, pemerintah maupun dunia usaha) sangat diperlukan dalam upaya mencapai tujuan pembangunan. Sesuai dengan tuntutan persaingan dan perkembangan dunia di era globalisasi dimana informasi terus berkembang peningkatan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Tangerang khususnya perlu diarahkan pada upaya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang diharapkan akan mampu tumbuh, berdaya tahan dan mampu bersaing serta tumbuhnya jiwa kewirausahaan. Disisi lain evaluasi hasil perencanaan tahun yang lalu akan menambah basis data untuk merencanakan program dan kegiatan selanjutnya.

Tujuan Evaluasi

1. Menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan: melalui evaluasi maka dapat diketahui derajat pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan.
2. Mengukur tingkat efisiensi suatu kebijakan: melalui evaluasi dapat diketahui berapa biaya dan manfaat dari suatu kebijakan.
3. Mengukur tingkat keluaran: mengukur berapa besar dan kualitas pengeluaran atau output dari suatu kebijakan.
4. Mengukur dampak suatu kebijakan: evaluasi ditujukan untuk melihat dampak dari suatu kebijakan, baik dampak positif maupun negatif.
5. Untuk mengetahui apabila ada penyimpangan: untuk mengetahui adanya penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi, dengan cara membandingkan antara tujuan dan sasaran dengan pencapaian target.
6. Sebagai masukan (input) suatu kebijakan yang akan datang: untuk memberikan masukan bagi proses kebijakan ke depan agar dihasilkan kebijakan yang lebih baik.

Indikator Evaluasi

1. Efektivitas: apakah hasil yang diinginkan telah tercapai.
2. Kecukupan: seberapa jauh hasil yang telah tercapai dapat memecahkan masalah?
3. Pemerataan: apakah biaya dan manfaat didistribusikan merata kepada kelompok masyarakat berbeda?
4. Responsivitas: apakah hasil kebijakan memuat preferensi/nilai kelompok dan dapat memuaskan mereka?
5. Ketepatan: apakah hasil yang dicapai bermanfaat?
6. Kaitan antara Monitoring dan Evaluasi adalah evaluasi

memerlukan hasil dari monitoring dan digunakan untuk kontribusi program.

Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 1.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 Triwulan I.

No	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		unit Perangkat Daerah Penanggun Jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	**Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja**																								**Kec. Rajeg**
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																							
			Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Kec. Rajeg	100 Persen	100	10.955.000.000	100	7.931.330.573	100	9.481.778.273	25	2.396.935.365	0	0,00	0	0,00	0	0,00	25	2.396.935.365	125	10.328.265.938	25	2.065.653.188	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																							

			Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun dibagi jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja dikali 100 persen Kinerja Perangkat Daerah"	0 dokumen	7	-	7	198.500.000	7	228.645.500	7	32.724.500		0,00		0,00		0,00	7	32.724.500	14	231.224.500	2,8	46.244.900	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																						
			Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah Kecamatan Rajeg	%	100,00	-	100,00	5.320.500.000	100	5.442.717.523	25	1.770.502.668		0,00		0,00		0,00	25	1.770.502.668	125	7.091.002.668	25	1.418.200.534	
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah																						
			Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Kecamatan Rajeg/Dokumen	dokumen	1	-	1	21.500.000	1	25.481.400	1	4.603.250,00		0,00		0,00		0,00	1	4.603.250	2	26.103.250	0,4	5.220.650	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																						
			Jumlah Pegawai yang difasilitasi/Orang	Orang	78	-	78	240.000.000	78	233.935.200	0	0,00		0,00		0,00		0,00	0	0	78	240.000.000	15,6	48.000.000	

		Administrasi Umum Perangkat Daerah																						
			Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah/Jenis	dokumen	11	-	11	629.820.000	11	924.318.370	11	162.700.243,00		0,00		0,00		0,00	11	162.700.243	22	792.520.243	4,4	158.504.049	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																						
			Tersedianya Jasa Penunjang pada Kecamatan Rajeg/Jenis	jenis	5	-	5	1.067.862.308	5	1.556.859.300	5	328.436.204,00		0,00		0,00		0,00	5	328.436.204	10	1.396.298.512	2	279.259.702	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																						
			Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/Jenis	jenis	5	-	5	821.461.000	5	1.069.820.980	5	58.388.500,00		0,00		0,00		0,00	5	58.388.500	10	879.849.500	2	175.969.900	
2	**Terpenuhinya pelayanan publik sesuai dengan standar kecamatan**																							**Kec. Rajeg**
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK																						
			Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara	Persen	100	8.820.000.000	100	8.000.000.000	100	8.839.702.200	25	2.931.225.000,00		0,00		0,00		0,00	25	2.931.225.000	125	10.931.225.000	25	2.186.245.000	

			Persentase pemenuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	persen	100		100		100		25	2.931.225.000,00		0,00		0,00		0,00	25		125	0	25		
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan																							
			Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar	Persen	100	-	100	254.000.000	100	99.702.200	25	0,00		0,00		0,00		0,00	25	0	125	254.000.000	25	50.800.000	
		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum																							
			Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara	Persen	100	-	100	8.000.000.000	100	8.740.000.000	25	2.931.225.000,00		0,00		0,00		0,00	25	2.931.225.000	125	10.931.225.000	25	2.186.245.000	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN																							
			Persentase pemenuhan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persen	100	-	100	3.579.000.000	100	4.794.998.900	25	894.069.619,00		0,00		0,00		0,00	25	894.069.619	125	4.473.069.619	25	894.613.924	
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa																							
			Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan pembi naan/pemberdayaan	Kelompok	5	-	5	955.000.000	5	1.148.356.000	5	627.415.645,00		0,00		0,00		0,00	5	627.415.645	10	1.582.415.645	2	316.483.129	
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan																							

			Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan pembi naan/pemberdayaan	Kelompok	5	-	5	2.584.000.000	5	3.624.866.300	5	266.653.974,00		0,00		0,00		0,00	5	266.653.974	10	2.850.653.974	2	570.130.795	
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan																							
			Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan pembi naan/pemberdayaan	Kelompok	5	-	5	40.000.000	5	21.776.600	5	0		0,00		0,00		0,00	5	0	10	40.000.000	2	8.000.000	
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM																							
			Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persen	100	-	100	425.100.000	100	102.682.100	25	5.309.000,00		0,00		0,00		0,00	25	5.309.000	125	430.409.000	25	86.081.800	
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum																							
			Jumlah kegiatan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan/Kali	Kali	4	-	4	425.100.000	4	102.682.100	4	0,00		0,00		0,00		0,00	0	0	4	425.100.000	0,8	85.020.000	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM																							
			Prosentase Program Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum	Persen	100	-	100	125.000.000	100	130.300.480	25	5.309.000,00		0,00		0,00		0,00	25	5.309.000	125	130.309.000	25	26.061.800	

		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah																						
			Jumlah Orang yang mengikuti pembinaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah/Orang	orang	65	-	65	125.000.000	65	130.300.480	65	15.173.000,00		0,00		0,00		0,00	65	15.173.000	130	140.173.000	26	28.034.600	
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA																						
			Persentase tertib administrasi pemerintahan desa	Persen	100	-	100	190.000.000	100	87.020.300	25	19.376.000,00		0,00		0,00		0,00	25	19.376.000	125	209.376.000	25	41.875.200	
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa																						
			Tersedianya Laporan Keuangan Desa Sesuai Standar dan Jumlah Desa yang di Fasilitasi	laporan	12	-	12	190.000.000	12	87.020.300	12	15.173.000,00		0,00		0,00		0,00	12	15.173.000	24	205.173.000	4,8	41.034.600	
Rata-rata capaian kinerja (%)											25%	25%	25%	25%										
Predikat kinerja																								
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																								
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																								

Beradasakan Tabel diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:
Kesimpulan:

1) Melaksanakan Evaluasi Capaian Program dan Kegiatan sesuai dengan target Renstra 2024-2026;
2) Memonitoring hasil capaian program dan kegiatan pada Triwulan ke II tahun pertama sesuai realisasi fisik pelaksanaan di lapangan;
3) Melaksanakan monitoring realisasi anggaran pada triwulan II atas program dan kegiatan terutama program strategis yang dilimpahkan kepada pemerintah Kecamatan;
4) Menyusun Berita Acara Monitoring dan Evaluasi berkala Capaian Renstra 2024-2026 kecamatan Rajeg kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2025 pada Triwulan II.

Kendala yang ditemukan :

1. Adanya perubahan harga satuan dilapangan sehingga perubahan pada Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah ditetapkan.
2. Proses administrasi pengadaan mengalami keterlambatan karena adanya revisi teknis dokumen serta menunggu penyesuaian anggaran perubahan. Hal ini berdampak pada pelaksanaan kegiatan fisik yang mundur dari jadwal semula.
3. Adanya perubahan atau penyesuaian kebijakan dari Pemerintah Kabupaten Tangerang berdampak langsung terhadap prioritas program, sehingga beberapa kegiatan perlu dilakukan penyesuaian baik dari sisi target maupun anggaran.
4. Pelaksanaan beberapa kegiatan teknis, terutama di bidang pelayanan publik dan pengelolaan data, terkendala oleh kurangnya tenaga teknis yang kompeten serta keterbatasan kapasitas perangkat kerja di tingkat kecamatan dan kelurahan.
5. Dalam beberapa kegiatan pemberdayaan, partisipasi aktif masyarakat belum sepenuhnya maksimal. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan informasi, kurangnya koordinasi antar pemangku kepentingan, serta rendahnya kesadaran terhadap peran serta dalam Pembangunan.

Langkah-langkah yang harus diambil :

1. Koordinasi dengan pihak ketiga untuk percepatan penyelesaian pelaksanaan kegiatan kontruksi.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang, merupakan Lembaga Teknis Daerah sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah dalam perencanaan pembangunan. Pencanangan pembangunan yang berkualitas dan professional dapat menjadi wahana untuk memperbaiki pola pembangunan di tingkat daerah, sehingga daerah dapat berkiprah dengan leluasa untuk membangun daerahnya sesuai potensi dan kemampuan yang ada (potensi lokal). Di sisi lain, kondisi era globalisasi merupakan tantangan besar yang harus dan langsung dihadapi pemerintah dan masyarakat Kabupaten Tangerang. Investor asing memiliki kebebasan penuh untuk membuka usaha di manapun sesuai

peruntukkannya, dan ini merupakan peluang pembangunan yang patut diraih dan dimanfaatkan dengan bijaksana.

Kecamatan Rajeg selaku lembaga teknis di bidang perencana harus mampu menjawab tantangan tersebut di atas. Keberhasilan suatu perencanaan dapat dilihat dari mulai proses penyampaian dengan tataran pelaksanaan/impelementasi di lapangan, sehingga akan terwujud sinergi antara perencanaan pembangunan baik ditingkat nasional, provinsi maupun kabupaten. Namun disisi lain sering berubah-ubahnya regeluasi tentang mekanisme perencanaan dari tingkat pusat akan memperlambat proses perenanaan dalam rangka menterpadukan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah provinsi dan perencanaan pembangunan kabupaten/kota belum bisa secara optimal.

Melihat kondisi tersebut di atas Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang selaku Badan Perencana mencoba untuk mensinergikan proses perencanaan baik tingkat pusat, provinsi dan kabupaten dalam rangka :

a. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan.
b. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.
c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan
d. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.
e. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien,efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Kecamatan Rajeg dalam melaksanakan rencana kerja memiliki indikator pelayanan kinerja, adapun indikator pelayanan kinerja tersebut dijelaskan pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang Provinsi Banten

No	Indikator	Standar Pelayanan Minimal	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analis
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2027	Tahun 2028	
1	Jumlah Data Nomor Induk Kependudukan yang terinput	Penginputan Data Kartu Tanda Penduduk		5280	5808	6600	5520	0	5808	6864	
2	Jumlah Data Nomor Kartu Keluarga yang terinput	Penginputan Data Kartu Keluarga		5016	5544	6072	5100	0	5544	6600	
3	Jumlah Data Nomor Induk Kependudukan yang terinput	Penginputan Data kartu Identitas Anak		528	792	1056	551	0	792	1320	
4	Jumlah Surat Keterangan Pindah Datang Antar Desa dan Kecamatan dalam Satu Kabupaten yang dilayani	Surat Keterangan Pindah Datang Antar Desa dan Kecamatan dalam Satu Kabupaten		1320	1584	1848	1388	0	1584	2112	
5	Jumlah Rekomendasi Ijin Pendirian/Operasional Yayasan Sosial, Organisasi Sosial dan Panti Sosial yang dilayani	Rekomendasi Ijin Pendirian/Operasional Yayasan Sosial, Organisasi Sosial dan Panti Sosial		5	5	5	6	0	5	6	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Kedudukan Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang, untuk selanjutnya disingkat Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang, merupakan Lembaga Teknis Daerah sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Camat dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang.

Isu-isu penting yang ada di Kecamatan Rajeg dalam penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah:

1. Adanya perubahan harga satuan dilapangan sehingga perubahan pada Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah ditetapkan;
2. Terdapat perbedaan target antara Renstra dan Renja karena seiring perjalanan waktu terdapat kebutuhan dan penganggaran diluar yang sudah ditargetkan pada Renstra;
3. Masih rendahnya kesadaran Masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan hidup yang sehat dan bersih;
4. Penanganan dan penurunan stunting
5. Peningkatan budaya membaca dan literasi terpadu
6. Peningkatan perlindungan perempuan, anak, difable, dan kaum marginal
7. Peningkatan pengarusutamaan gender
8. Pemberdayaan pemuda
9. Peningkatan ketentraman dan ketertiban
10. Penguatan Akses Permodalan dan Pemasaran Sektor Usaha Mikro dan Industri Kecil Menengah (IKM)
11. Optimalisasi Kampung Tematik
12. Peningkatan dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Program Ketahanan Pangan
13. Pengembangan Pekarangan Pangan Lestari
14. Pemeliharaan dan pembangunan jalan
15. Pengendalian kemacetan
16. Penanggulangan banjir
17. Penanganan Rumah Tidak Layak Huni
18. Peningkatan kualitas lingkungan Kawasan kumuh
19. Percepatan Desa/Kelurahan Bebas ODF
20. Peningkatan kinerja perencanaan pembangunan, penganggaran, pelaksanaan kegiatan, serta akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

2.4 Review Terhadap Rencana Awal RKPD

Review terhadap rancangan Awal RKPD Tahun 2025 berkaitan dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2025. Rumusan kebutuhan program dan kegiatan dilengkap dengan lokasi, indikator kinerja, besaran target/tolok ukur, dan besaran dana yang dibutuhkan.

Pada tahun anggaran 2025 review rancangan awal RKPD terhadap hasil analisis kebutuhan dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Terdapat perbedaan pada kegiatan Pemilihan Kepala Desa yang tidak terdapat pada Renja Tahun 2025 karena pada Kegiatan tersebut disiapkan untuk pemilihan kepala desa Namun pada taun berkenaan terdapat aturan baru

berdasarkan undang-undang no. 3 tahun 2024 tentang perpanjangan masa jabatan kepala Desa;

2. Terdapat perbedaan Pagu Anggaran antara Renstra dan Renja karena pada saat penyusunan Renja mengikuti ketersediaan Pagu Anggaran yang diberikan pada tahun berkenaan;
3. Terdapat perbedaan target indikator dan sasaran antara Renstra dan Renja karena disebabkan perubahan pagu anggaran akibat pergeseran antar pagu pada sub kegiatan;

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Rajeg Tahun 2025 merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam arah kebijakan RPJPD Kabupaten Tangerang tahun 2024-2026 yang dijabarkan dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026. Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Rajeg Tahun 2024 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang "Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah", Perbup RKPD Tahun 2024 Nomor 21 Tahun 2022, Tanggal 1 Juli 2022, Perbup Perubahan RKPD Tahun 2022 No. 30 Tahun 2022 Tanggal 20 Juli 2022, agar di dalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen perencanaan. Sejalan dengan kebijakan pemerintah Propinsi Banten, tolok ukur kinerja pembangunan dilakukan melalui pengukuran indikator makro (makro ekonomi dan makro sosial), yang menempatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai indikator keberhasilan pembangunan dan evaluasi kebijakan pembangunan.

Dalam konteks perencanaan pembangunan, Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan, melayani/memenuhi kebutuhan masyarakat.

Dibawah ini merupakan usulan Program dan Kegiatan yang bersumber dari masyarakat :

Tabel 3.
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang

No.	*Program/Kegiatan*	*Lokasi*	*Indikator Kinerja*	*Besaran/Volume*	*Catatan*
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
1	*Pemagaran Gedung Puskesmas Sukatani*	*Kelurahan Sukatani*	*Memberikan keamanan dan kenyaman pada petugas dalam berjaga sehingga bisa bekerja dengan maksimal dalam mengamankan*	*1 Lokal*	*Dinas Kesehatan*

			puskesmas Sukatani		
2	*Pembangunan Gedung Poned Puskesmas Rajeg*	*Desa Mekarsari*	*Terpenuhinya Kebutuhan Layanan Persalinan Masyarakat*	*1 Lokal*	*Dinas Kesehatan*
3	*Pembangunan 3 Ruang Kelas SDN SUKATANI V*	*Kelurahan Sukatani*	*Meningkatkan Kualitas Pendidikan*	*P:27,L:8,L:216*	*Dinas Pendidikan*
4	Perbaikan Ruang Kelas SDN Sukamanah 2	*Kp. Sumur Daon Rt.02 Rw.05 Desa Sukamanah*	*Meningkatkan Kualitas Pendidikan*	*1 Ruang*	*Dinas Pendidikan*
5	Rehab Berat SDN RANCABANGO 1	*Desa Rancabango*	*Meningkatkan Kualitas Pendidikan*	*3 Ruang Kelas*	*Dinas Pendidikan*
6	Tambah Ruang Kelas (TRK) SDN Rancabango 4	*Desa Rancabango*	*Meningkatkan Kualitas Pendidikan*	*3 Ruang Kelas*	*Dinas Pendidikan*
7	Tambah Ruang Kelas (TRK) SDN Tanjakan III	*Kp.Tanjakan Rt.08/03 Desa Tanjakan*	*Meningkatkan Kualitas Pendidikan*	*2 Lokal*	*Dinas Pendidikan*
8	Rehab 3 Ruang Kelas SDN Rajeg V	*Kp. Pabuaran, Perum Rajeg Asri Desa Rajeg*	*Meningkatkan Kualitas Pendidikan*	*3 Lokal*	*Dinas Pendidikan*
9	Pemagaran SDN SUKASARI I & III	*KP NANGGUL RT 002 RW 003 DESA SUKASARI*	*Meningkatkan Kualitas Pendidikan*	*200 X 3 M*	*Dinas Pendidikan*
10	Pemagaran TK Negeri Rajawali Rajeg	*Jl Utama Perum Rajeg Asri Desa Rajeg*	*Meningkatkan Kualitas Pendidikan*	*10 x 20 x 60 CM*	*Dinas Pendidikan*
11	Rehab Berat Ruang Kelas TK Nurul Falah	*Kp. Jungkel Rt.06/02*	*Meningkatkan Kualitas Pendidikan*	*3 RUANGAN*	*Dinas Pendidikan*
12	PEMAGARAN SDN KP BARU IV	*Desa Pangarengan*	*Meningkatkan Kualitas Pendidikan*	*100 M2*	*Dinas Pendidikan*
13	Ruang Kantor Guru	*SDN Badak I Desa Jambu Karya*	*Meningkatkan Kualitas Pendidikan*	*1 unit*	*Dinas Pendidikan*
14	Pembinaan Kapasitas FKDM Kecamatan Rajeg	*Desa Mekarsari*	*Meningkatkan Kualitas SDM*	*40 Orang/Desa dan Kelurahan*	*KESBANGPOL*
15	Peningkatan Keterampilan Tata Boga Bagi Guru PAUD	*Desa Sukamanah*	*Meningkatkan Kualitas SDM*	*450 Guru*	*Dinas Tenaga Kerja*
16	Pembinaan Kapasitas SDM Peternak Hewan Di Desa Tanjakan Mekar	*Desa Tanjakan Mekar*	*Meningkatkan Kualitas SDM*	*200 Org*	*Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan*
17	Bantuan Makanan Tambahan Untuk Balita (STUNTING)	*DESA SUKASARI*	*Meningkatkan Kualitas SDM*	*1 PAKET*	*Dinas Kesehatan*
18	Pelatihan Pangkas Rambut	*Kelurahan Sukatani*	*Meningkatkan Perekonomian Masyarakat*	*1 Paket*	*Dinas Tenaga Kerja*
19	Pemanfaatan Kali Cileles Sebagai Sarana Wisata,Sarana Tranportasi Menuju Kemiri	*Desa Rancabango*	*Meningkatkan Perekonomian Masyarakat*	*3Km*	*Disporabudpar*
20	Pelatihan Jahit	*Ds. Rajeg Mulya*	*Meningkatkan Perekonomian Masyarakat*	*10 kelompok*	*Dinas Tenaga Kerja*
21	Inovasi Kampung Tematik Pengembangan Situ	*Ds. Rajeg Mulya*	*Meningkatkan Perekonomian Masyarakat*	*1 Paket*	*Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa*
22	Budidaya Ikan Lele	*KP.TEGAL RT 012/005 Ds. Tanjakan*	*Meningkatkan Perekonomian Masyarakat*	*100 Ekor*	*Dinas Perikanan*

23	Ternak Kambing	*Desa Rajeg*	*Meningkatkan Perekonomian Masyarakat*	*100 Ekor*	*Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan*
24	Lanjutan Pembangunan Gerai UMKM Kecamatan Rajeg	*Desa Mekarsari*	*Meningkatkan Perekonomian Masyarakat*	*Paket*	*DTRB*
25	Taman Rekreasi Edukasi	*Desa Mekarsari*	*Meningkatkan Perekonomian Masyarakat*	*200M X 100M*	*Disporabudpar*
26	Ternak Ayam Petelur dan Pembuatan Kandang dan Pakan	*Kp. Jungkel Rt.09/04 Desa Tanjakan Mekar*	*Meningkatkan Perekonomian Masyarakat*	*10,000 Ekor*	*Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan*
27	Pelatihan Menjahit dan Pembagian Mesin Jahit	*Desa Pangarengan*	*Meningkatkan Perekonomian Masyarakat*	*30 ORANG*	*Dinas Tenaga Kerja*
28	Pemanfaatan Galian Tanah jadi Destinasi Wisata	*Desa Daon*	*Meningkatkan Perekonomian Masyarakat*	*1 Lokal*	*Disporabudpar*
29	Fasilitas Penguatan Promosi Pemasaran Peci	*Desa Daon*	*Meningkatkan Perekonomian Masyarakat*	*1 UNIT*	*Dinas Koperasi dan Usaha Mikro*
30	Pemberdayaan Budidaya Ayam Kampung (termasuk Kandang) Kp. Guha Pabuaran RT. 06/03	*Desa Lembangsari*	*Meningkatkan Perekonomian Masyarakat*	*2 KPM (100 Ekor)*	*Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan*
31	Pemberdayaan Pelatihan Menjahit Ibu Rumah Tangga	*Desa Sukasari*	*Meningkatkan Perekonomian Masyarakat*	*10 KELOMPOK*	*Dinas Tenaga Kerja*
32	BANTUAN PUPUK (Untuk Petani)	*Desa Sukasari*	*Meningkatkan Perekonomian Masyarakat*	*10 KELOMPOK*	*Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan*
33	Pelatihan Ketrampilan Sablon/ Pembelian Alat	*Desa Daon*	*Meningkatkan Kualitas SDM*	*1 Unit*	*Dinas Tenaga Kerja*
34	Pengadaan mesin giling padi	*kelompok tani Desa jambu Karya*	*Meningkatkan Perekonomian Masyarakat*	*1 x 4 kelompok*	*Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan*
35	Pemagaran Makam Wakaf Perum PSP	*Kp. Cambay RT. 005/005 Kel. Sukatani*	*Mengamankan Aset Desa*	*220 m*	*Dinas Perkim*
36	Betonisasi Jalan Utama Kp Cipaniis Rt.015/004	*Desa Rancabango*	*Memperlancar Mobilisasi Masyarakat*	*4M X 200M*	*Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air*
37	Pembangunan Jembatan Jalan Utama Penghubung Rajeg Mulya dan Desa Mekarsari Prm Nuansa Mekarsari Rt.02/05	*Desa Mekarsari*	*Memperlancar Mobilisasi Masyarakat*	*4 m x 5 m*	*Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air*
38	SPAL / SALURAN AIR	*Desa Rancabango*	*Memperlancar saluran air*	*500 M X 2 SISI*	*Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air*
39	BETONISASI KP TEGAL RT 013/005	*Desa Tanjakan*	*Memperlancar Mobilisasi Masyarakat*	*3 M X 150 M*	*Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air*
40	Pemagaran Pemakaman Umum Perum Rajeg Asri	*Desa Rajeg*	*Mengamankan Aset Desa*	*300 M'*	*Dinas Perkim*
41	Pembangunan Jembatan Jalan Utama Penghubung Desa Lembangsari & Desa Rancabango Kp. Sukabakti RT. 07/04	*Desa Lembangsari*	*Memperlancar Mobilisasi Masyarakat*	*6m x 5m*	*Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air*
42	Pembangunan Jembatan Rawa Bolang KP. RAWA BOLANG RT. 001/006	*Desa Sukasari*	*Memperlancar Mobilisasi Masyarakat*	*25 X 5 M*	*Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air*

43	Pembangunan Betonisasi Kp. Jungkel Tegal Wetan Rt.13/06	*Desa Tanjakan Mekar*	*Memperlancar Mobilisasi Masyarakat*	*3,5m x 1.000m*	*Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air*
44	Pembangunan Jembatan Daon-Pangarengan Kp. Daon Sabrang Rt.01/04	*Desa Daon*	*Memperlancar Mobilisasi Masyarakat*	*15 x 8 m*	*Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air*
45	Hotmix Kp. Seglog Desa Sukamanah Kp. Seglog	*Desa Sukamanah*	*Memperlancar Mobilisasi Masyarakat*	*2 M x 200 M*	*Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air*
46	Paving Blok Kp. Jambu Rt. 007/002	*Desa Jambu Karya*	*Memperlancar Mobilisasi Masyarakat*	*500 M X 3 M*	*Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air*
47	Rehab Total Gedung Serba Guna (GSG) Kec. Rajeg	*Kantor Kecamatan Rajeg Desa Mekarsari*	*Tersedianya Ruang Rapat*	*12 m x 10 m*	*DTRB*
48	Penataan Halaman Stadion Mini Kec. Rajeg	*Kelurahan Sukatani*	*Tertatanya Halaman Stadion Mini*	*12 m x 10 m*	*DTRB*
49	Penataan Halaman Kantor Kecamatan Rajeg	*Kantor Kecamatan Rajeg Desa Mekarsari*	*Tertatanya Halaman Kantor*	*100 M*	*DTRB*
50	Penataan Terminal Kukun	*Kelurahan Sukatani*	*Tersedianya Terminal yang tertata dan nyaman*	*25 x 30 m*	*DISHUB*
51	Pembangunan Tambah Ruang Kelas (TRK) SDN Sukatani I	*Kelurahan Sukatani*	*Meningkatkan Kualitas Pendidikan*	*2 Lantai*	*Dinas Pendidikan*
52	Perluasan Lahan SDN Rancabango 3	*Desa Lembangsari*	*Meningkatkan Kualitas Pendidikan*	*1.000 M*	*Dinas Pendidikan*
53	Pembelian Lahan Jalan Umum Menuju TPU	*Desa Pangarengan*	*Memperlancar Mobilisasi Masyarakat*	*500 X 3 M*	*Dinas Perkim*

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Berbeda dengan periode 2019-2023, sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru yang menyebabkan adanya perbedaan pendekatan perumusan tujuan dan sasaran karena tidak tersedianya visi dan misi Kepala Daerah. Sehingga untuk tetap menjaga keselarasan dengan dokumen perencanaan yang masih berlaku dan menjaga kesinambungan pembangunan antar periode, maka Pemerintah Kabupaten Tangerang merumuskan tema Rencana Pembangunan Daerah 2024-2026 yang mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
2. Peraturan Gubernur Banten Nomor 33 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2023-2026;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2005-2025

Untuk mewujudkan Visi tersebut di atas maka ditetapkan Misi Pemerintah Kabupaten Tangerang sebagai berikut :

1) Mewujudkan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Tangerang yang mandiri, berdaya saing tinggi dan berakhlak mulia;
2) Mewujudkan perekonomian daerah yang maju dan berdaya saing berbasis pada potensi keunggulan lokal;
3) Mewujudkan pelayanan dasar bagi masyarakat secara merata dan proporsional;
4) Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, demokratis dan partisipatif; dan
5) Mewujudkan pembangunan yang terpadu dan serasi dengan pendekatan.

Pengembangan wilayah berbasis ekonomi dan ekologi. Kecamatan Rajeg sebagai OPD pembantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan di bidang perhubungan. Dikaitkan dengan visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Tangerang dalam RPJPD 2005 – 2025 serta urusan pemerintahan yang diselenggarakan, maka fungsi dan tugas Kecamatan Rajeg terkait erat dengan pencapaian Misi keempat yaitu: “Mewujudkan tata Pemerintahan yang baik, demokratis dan Partisipatif” .

Pembangunan berkelanjutan dan Pemerataan infrastruktur Secara umum, pemerataan pembangunan antar daerah merupakan arahan untuk menyeimbangkan pembangunan antar wilayah melalui upaya penyebaran kegiatan ekonomi. Infrastruktur dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat ke seluruh wilayah Kecamatan merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi karena secara langsung peningkatan infrastruktur yang menghubungkan antara pusat pertumbuhan ekonomi mampu mendorong kelancaran distribusi barang dan jasa, sehingga dapat

mengurangi biaya produksi. Dengan demikian ketersediaan infrastruktur akan berpengaruh pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang menyelenggarakan fungsi-fungsi yaitu Penyusunan Rencana Strategis berdasarkan Rencana Strategis Pemerintah Daerah.

3.2 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Faktor-faktor yang menjadi bahan Pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan yaitu :

a. Pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Tangerang;
b. Pengentasan kemiskinan Ekstrim;
c. Pengentasan Stunting;
d. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah.

Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:

- Kecamatan Rajeg Pada Tahun 2025 memiliki 6 Program, 15 Kegiatan dan 31 Sub Kegiatan;
- Jumlah Pagu Indikatif Kecmatan Rajeg pada Tahun 2025 Perubahan Sebesar Rp17.236.152.170,- yang berasal dari unsur kewilayahan.

Tabel 6.
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025
Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang Provinsi Banten.

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	7	8	12	13	14	15			
	Kecamatan Rajeg				17.236.152.170				
7	UNSUR KEWILAYAHAN				17.236.152.170				
701	KECAMATAN				17.236.152.170				
70101	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Kec. Rajeg		100%	9.758.074.870				
701012.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun dibagi jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja dikali 100 persen Kinerja Perangkat Daerah"		7 dokumen	210.695.000				
701012.010001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Tangerang, Rajeg, Semua Kel/Desa	6 Dokumen	68.200.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
701012.010006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Tangerang, Rajeg, Semua Kel/Desa	3 Laporan	78.910.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
701012.010007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Tangerang, Rajeg, Semua Kel/Desa	2 Laporan	63.585.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
701012.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah		2 dokumen	5.881.682.170				
701012.020001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Tangerang, Rajeg, Semua Kel/Desa	12 Orang/bulan	5.846.152.170	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
701012.020007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD								
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Tangerang, Rajeg, Semua Kel/Desa	1 Laporan	35.530.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
701012.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		4 Laporan	21.240.000				

701012.030006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD								
		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Tangerang, Rajeg, Semua Kel/Desa	4 Laporan	21.240.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
701012.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang difasilitasi/Orang		78 orang	200.440.000				
701012.050002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya								
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Tangerang, Rajeg, Semua Kel/Desa	60 Paket	100.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
701012.050009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi								
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Tangerang, Rajeg, Semua Kel/Desa	60 Orang	100.440.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
701012.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah/Jenis		11 dokumen	446.510.500				
701012.060001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Tangerang, Rajeg, Semua Kel/Desa	4 Paket	20.662.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
701012.060002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Tangerang, Rajeg, Semua Kel/Desa	5 Paket	75.885.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
701012.060004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Tangerang, Rajeg, Semua Kel/Desa	50 Paket	48.778.300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
701012.060005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Tangerang, Rajeg, Semua Kel/Desa	5 Paket	33.823.200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
701012.060006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Tangerang, Rajeg, Semua Kel/Desa	5 Dokumen	24.840.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
701012.060008	Fasilitasi Kunjungan Tamu								
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Tangerang, Rajeg, Semua Kel/Desa	12 Laporan	84.720.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
701012.060009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Tangerang, Rajeg, Semua Kel/Desa	4 Laporan	157.802.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
701012.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang pada Kecamatan Rajeg/Jenis		5 jenis	1.171.765.800				
701012.080001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Tangerang, Rajeg, Semua Kel/Desa	1 Laporan	2.310.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
701012.080002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								

		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Tangerang, Rajeg, Semua Kel/Desa	5 Laporan	175.327.800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
701012.080004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Tangerang, Rajeg, Semua Kel/Desa	1 Laporan	994.128.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
701012.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/Jenis		5 jenis	1.825.741.400				
701012.090001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Tangerang, Rajeg, Semua Kel/Desa	6 Unit	287.491.400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
701012.090006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Tangerang, Rajeg, Semua Kel/Desa	10 Unit	38.250.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
701012.090009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Tangerang, Rajeg, Semua Kel/Desa	4 Unit	1.500.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
70102	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara		100 persen 100 Persen	6.051.592.400				
701022.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar		100 %	37.984.200				
701022.020003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan								
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Tangerang, Rajeg, Semua Kel/Desa	1 Laporan	37.984.200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
701022.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara		100%	6.013.608.200				
701022.030001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum								
		Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kab. Tangerang, Rajeg, Semua Kel/Desa	50 Dokumen	6.013.608.200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
70103	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemenuhan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan		100%	1.251.442.900				
701032.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan/pemberdayaan		5 kelompok	1.210.364.300				
701032.010001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa								

		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kab. Tangerang, Rajeg, Semua Kel/Desa	1 Lembaga Kemasyarakatan	70.944.600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
701032.010003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan								
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Tangerang, Rajeg, Semua Kel/Desa	5 Laporan	1.139.419.700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
701032.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan/pemberdayaan		5 kelompok	41.078.600				
701032.030004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat								
		Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kab. Tangerang, Rajeg, Semua Kel/Desa	1 Laporan	41.078.600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
70104	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum		100%	50.102.000				
701042.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	umlah kegiatan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan/Kali		4 kali	50.102.000				
701042.010001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan								
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kab. Tangerang, Rajeg, Semua Kel/Desa	4 Laporan	50.102.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
70105	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Prosentase Program Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum		100 %	73.570.000				
701052.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti pembinaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah/Orang		65 orang	73.570.000				
701052.010001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia								
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kab. Tangerang, Rajeg, Semua Kel/Desa	65 Orang	50.500.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
701052.010008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan								

		Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kab. Tangerang, Rajeg, Semua Kel/Desa	4 Dokumen	23.070.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
70106	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase tertib administrasi pemerintahan desa		100%	51.370.000				
701062.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Tersedianya Laporan Keuangan Desa Sesuai Standar dan Jumlah Desa yang di Fasilitasi		12 Laporan	51.370.000				
701062.010002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa								
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kab. Tangerang, Rajeg, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	51.370.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
	Kelurahan Sukatani				2.149.440.000				
7	UNSUR KEWILAYAHAN				2.149.440.000				
701	KECAMATAN				2.149.440.000				
70101	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Kec. Rajeg		100 Persen	736.029.000				
701012.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah/Jenis		11 dokumen	118.500.000				
701012.060002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Tangerang, Rajeg, Sukatani	10 Paket	50.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
701012.060004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Tangerang, Rajeg, Sukatani	20 Paket	18.040.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
701012.060006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Tangerang, Rajeg, Sukatani	3 Dokumen	3.840.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
701012.060008	Fasilitasi Kunjungan Tamu								
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Tangerang, Rajeg, Sukatani	12 Laporan	46.620.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
701012.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang pada Kecamatan Rajeg/Jenis		5 jenis	377.529.000				
701012.080002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Tangerang, Rajeg, Sukatani	1 Laporan	66.261.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
701012.080004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Tangerang, Rajeg, Sukatani	12 Laporan	311.268.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
701012.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/Jenis		5 Jenis	240.000.000				
701012.090006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Tangerang, Rajeg, Sukatani	5 Unit	40.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
701012.090009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								

		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Tangerang, Rajeg, Sukatani	5 Unit	200.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
70102	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar Persentase pemenuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik		100 % 100 Persen 100 % 50 % 100 persen	50.000.000				
701022.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar		100 % 100 %	50.000.000				
701022.020003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan								
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Tangerang, Rajeg, Sukatani	1 Laporan	50.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
70103	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemenuhan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan		100 %	1.317.040.000				
701032.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan/pemberdayaan		5 kelompok	1.317.040.000				
701032.020001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan								
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kab. Tangerang, Rajeg, Sukatani	1 Lembaga Kemasyarakatan	467.040.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
701032.020002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan								
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kab. Tangerang, Rajeg, Sukatani	20 Unit	750.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
701032.020003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan								
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kab. Tangerang, Rajeg, Sukatani	5 Pokmas / Ormas	100.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
70104	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum		100 %	46.371.000				
701042.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan/Kali		4 kali	46.371.000				
701042.010001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan								
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kab. Tangerang, Rajeg, Sukatani	4 Laporan	46.371.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Rencana kerja OPD Kecamatan Rajeg tersusun dalam program yang merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program tersebut, ditetapkan beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannyaTujuan.

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan kedalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran tujuan, visi dan misi organisasi. Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuntitatif maupun kualitatif. Untuk mengakomodir kebijakan yang disebabkan oleh adanya perubahan tugas pokok dan fungsi OPD Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang, diperlukan penyempurnaan maupun penyesuaian program dan kegiatan di dalam renstra OPD guna memenuhi kebutuhan tersebut.

Rencana Kerja merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu pemerintahan di Kabupaten Tangerang.

Tabel 7.
Rencana Kerja Pendanaan Tahun Anggaran 2025

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	KECAMATAN RAJEG				**19.385.592.170,00**	**31.449.254.733,00**	**31.684.588.030,00**	**12.298.995.860,00**					
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**19.385.592.170,00**	**31.449.254.733,00**	**31.684.588.030,00**	**12.298.995.860,00**					
7,01	**KECAMATAN**				**19.385.592.170,00**	**31.449.254.733,00**	**31.684.588.030,00**	**12.298.995.860,00**					
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	-	-	**10.501.628.020,00**	**11.354.484.073,00**	**11.582.885.140,00**	**-10.501.628.020,00**					
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun dibagi jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja dikali 100 persen Kinerja Perangkat Daerah"*	7 dokumen	7 dokumen	211.188.000,00	239.403.000,00	184.616.000,00	-26.572.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia	KECAMATAN RAJEG
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah												
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	68.255.000,00	71.930.000,00	52.687.000,00	-15.568.000,00	Kab. Tangerang, Rajeg, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia	KECAMATAN RAJEG

											penyeludupan.		
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD												
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	3 Laporan	75.461.000,00	74.591.000,00	57.027.000,00	-18.434.000,00	Kab. Tangerang, Rajeg, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia	KECAMATAN RAJEG
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan	67.472.000,00	92.882.000,00	74.902.000,00	7.430.000,00	Kab. Tangerang, Rajeg, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia	KECAMATAN RAJEG
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah Kecamatan Rajeg*	100 %	100 %	5.881.747.170,00	6.275.207.845,00	6.580.456.592,00	698.709.422,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	KECAMATAN RAJEG
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN												

		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	12 Orang/bulan	5.846.152.170,00	6.239.467.845,00	6.554.918.592,00	708.766.422,00	Kab. Tangerang, Rajeg, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	KECAMATAN RAJEG
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD												
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	1 Laporan	1 Laporan	35.595.000,00	35.740.000,00	25.538.000,00	-10.057.000,00	Kab. Tangerang, Rajeg, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	KECAMATAN RAJEG
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Kecamatan Rajeg/Dokumen*	1 dokumen	1 dokumen	22.400.000,00	22.240.000,00	18.413.000,00	-3.987.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	KECAMATAN RAJEG
7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD												
		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	4 Laporan	22.400.000,00	22.240.000,00	18.413.000,00	-3.987.000,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tangerang, Rajeg, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	KECAMATAN RAJEG

7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Pegawai yang difasilitasi/Orang*	78 orang	78 orang	200.440.000,00	288.341.000,00	258.046.600,00	57.606.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	KECAMATAN RAJEG
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya												
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	60 Paket	60 Paket	100.000.000,00	141.626.000,00	141.626.000,00	41.626.000,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tangerang, Rajeg, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	KECAMATAN RAJEG
7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi												
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	60 Orang	60 Orang	100.440.000,00	146.715.000,00	116.420.600,00	15.980.600,00	Kab. Tangerang, Rajeg, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	KECAMATAN RAJEG
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah/Jenis*	11 dokumen	11 dokumen	584.111.300,00	983.350.300,00	873.654.520,00	289.543.220,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	KECAMATAN RAJEG

7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor												
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	20.662.000,00	20.662.000,00	20.662.000,00	0,00	Kab. Tangerang, Rajeg, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	KECAMATAN RAJEG
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor												
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	75.885.000,00	424.842.000,00	424.842.000,00	348.957.000,00	Kab. Tangerang, Rajeg, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	KECAMATAN RAJEG
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor												
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	50 Paket	50 Paket	48.778.300,00	80.718.300,00	81.756.520,00	32.978.220,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tangerang, Rajeg, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	KECAMATAN RAJEG
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan												

		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	52.924.000,00	63.324.000,00	47.452.000,00	-5.472.000,00	Kab. Tangerang, Rajeg, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	KECAMATAN RAJEG
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan												
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	5 Dokumen	24.840.000,00	69.840.000,00	69.840.000,00	45.000.000,00	Kab. Tangerang, Rajeg, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	KECAMATAN RAJEG
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu												
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	84.720.000,00	78.840.000,00	59.130.000,00	-25.590.000,00	Kab. Tangerang, Rajeg, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	KECAMATAN RAJEG
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD												
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	4 Laporan	157.802.000,00	110.128.000,00	55.064.000,00	-102.738.000,00	Kab. Tangerang, Rajeg, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	KECAMATAN RAJEG

7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Jasa Penunjang pada Kecamatan Rajeg/Jenis*	5 jenis	5 jenis	1.549.558.800,00	1.540.252.368,00	1.662.008.868,00	112.450.068,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	KECAMATAN RAJEG
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat												
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	2.574.000,00	2.574.000,00	1.930.500,00	-643.500,00	Kab. Tangerang, Rajeg, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	KECAMATAN RAJEG
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik												
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 Laporan	5 Laporan	175.327.800,00	180.127.800,00	180.127.800,00	4.800.000,00	Kab. Tangerang, Rajeg, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	KECAMATAN RAJEG
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor												
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	994.128.000,00	980.021.568,00	1.068.821.568,00	74.693.568,00	Kab. Tangerang, Rajeg, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia	KECAMATAN RAJEG

7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/Jenis*	5 Jenis	5 Jenis	2.052.182.750,00	2.005.689.560,00	2.005.689.560,00	-46.493.190,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	KECAMATAN RAJEG
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan												
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	6 Unit	287.491.400,00	327.525.960,00	327.525.960,00	40.034.560,00	Kab. Tangerang, Rajeg, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	KECAMATAN RAJEG
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit	38.250.000,00	43.250.000,00	43.250.000,00	5.000.000,00	Kab. Tangerang, Rajeg, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	KECAMATAN RAJEG
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya												
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	4 Unit	1.486.441.350,00	1.580.863.600,00	1.580.863.600,00	94.422.250,00	Kab. Tangerang, Rajeg, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	KECAMATAN RAJEG

7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**	**100 100 persen Persen**	**-**	**6.094.838.650,00**	**15.282.845.960,00**	**15.646.498.590,00**	**-6.094.838.650,00**					
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar*	100 %	100 %	88.168.800,00	112.845.960,00	406.498.590,00	318.329.790,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	KECAMATAN RAJEG
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan												
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	38.168.800,00	76.028.800,00	374.398.530,00	336.229.730,00	Kab. Tangerang, Rajeg, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	KECAMATAN RAJEG
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	*Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara*	100 %	100 %	6.006.669.850,00	15.170.000.000,00	15.240.000.000,00	9.233.330.150,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	KECAMATAN RAJEG
7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum												

		Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	50 Dokumen	50 Dokumen	6.006.669.850,00	15.170.000.000,00	15.240.000.000,00	9.233.330.150,00	Kab. Tangerang, Rajeg, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	KECAMATAN RAJEG
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**	**-**	**-**	**2.567.712.500,00**	**4.445.584.700,00**	**4.179.430.300,00**	**-2.567.712.500,00**					
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-	-	1.209.593.900,00	2.412.415.700,00	2.247.413.300,00	1.037.819.400,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Meningkatkan Perekonomian Masyarakat	KECAMATAN RAJEG
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa												
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	70.174.200,00	95.122.400,00	95.122.400,00	24.948.200,00	Kab. Tangerang, Rajeg, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Meningkatkan Perekonomian Masyarakat	KECAMATAN RAJEG
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan												
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5 Laporan	5 Laporan	1.139.419.700,00	2.317.293.300,00	2.152.290.900,00	1.012.871.200,00	Kab. Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tangerang, Rajeg, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Meningkatkan Perekonomian Masyarakat	KECAMATAN RAJEG

7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan/pemberdayaan*	5 kelompok	5 kelompok	41.078.600,00	40.893.000,00	28.413.000,00	-12.665.600,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Meningkatkan Perekonomian Masyarakat	KECAMATAN RAJEG
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat												
		Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	1 Laporan	41.078.600,00	40.893.000,00	28.413.000,00	-12.665.600,00	Kab. Tangerang, Rajeg, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Meningkatkan Perekonomian Masyarakat	KECAMATAN RAJEG
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum**	**100 %**	**100 %**	**96.473.000,00**	**87.447.000,00**	**57.640.000,00**	**-96.473.000,00**					
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah kegiatan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan/Kali*	4 kali	4 kali	96.473.000,00	87.447.000,00	57.640.000,00	-38.833.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	KECAMATAN RAJEG
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan												
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	4 Laporan	50.102.000,00	56.151.000,00	35.744.000,00	-14.358.000,00	Kab. Tangerang, Rajeg, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	KECAMATAN RAJEG

											mencapai masyarakat yang adil dan makmur.		
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**[deleted] Prosentase Program Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum**	**100 %**	**100 %**	**73.570.000,00**	**217.264.000,00**	**167.992.000,00**	**-73.570.000,00**					
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Jumlah Orang yang mengikuti pembinaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah/Orang*	65 orang	65 orang	73.570.000,00	217.264.000,00	167.992.000,00	94.422.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	KECAMATAN RAJEG
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia												
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan	65 Orang	65 Orang	50.500.000,00	28.379.000,00	20.490.000,00	-30.010.000,00	Kab. Tangerang, Rajeg, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	KECAMATAN RAJEG

		Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia											
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan												
		Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 Dokumen	4 Dokumen	23.070.000,00	188.885.000,00	147.502.000,00	124.432.000,00	Kab. Tangerang, Rajeg, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	KECAMATAN RAJEG
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase tertib administrasi pemerintahan desa**	**100 %**	**100 %**	**51.370.000,00**	**61.629.000,00**	**50.142.000,00**	**-51.370.000,00**					
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Tersedianya Laporan Keuangan Desa Sesuai Standar dan Jumlah Desa yang di Fasilitasi*	12 laporan	12 laporan	51.370.000,00	61.629.000,00	50.142.000,00	-1.228.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	KECAMATAN RAJEG
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa												

		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 Dokumen	12 Dokumen	51.370.000,00	61.629.000,00	50.142.000,00	-1.228.000,00	Kab. Tangerang, Rajeg, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	KECAMATAN RAJEG
	KELURAHAN SUKATANI				**19.385.592.170,00**	**31.449.254.733,00**	**31.684.588.030,00**	**12.298.995.860,00**					
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**19.385.592.170,00**	**31.449.254.733,00**	**31.684.588.030,00**	**12.298.995.860,00**					
7,01	**KECAMATAN**				**19.385.592.170,00**	**31.449.254.733,00**	**31.684.588.030,00**	**12.298.995.860,00**					
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Kec. Rajeg**	**100 Persen**	**100 Persen**	**10.501.628.020,00**	**11.354.484.073,00**	**11.582.885.140,00**	**-10.501.628.020,00**					
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah/Jenis*	11 dokumen	11 dokumen	584.111.300,00	983.350.300,00	873.654.520,00	289.543.220,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	KECAMATAN RAJEG
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor												
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	50.000.000,00	31.564.000,00	31.564.000,00	-18.436.000,00	Kab. Tangerang, Rajeg, Sukatani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	KECAMATAN RAJEG
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor												

		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 Paket	20 Paket	18.040.000,00	53.602.000,00	46.654.000,00	28.614.000,00	Kab. Tangerang, Rajeg, Sukatani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	KECAMATAN RAJEG
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan												
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	3 Dokumen	3.840.000,00	3.840.000,00	3.840.000,00	0,00	Kab. Tangerang, Rajeg, Sukatani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	KECAMATAN RAJEG
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu												
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	46.620.000,00	45.990.000,00	32.850.000,00	-13.770.000,00	Kab. Tangerang, Rajeg, Sukatani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	KECAMATAN RAJEG
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Jasa Penunjang pada Kecamatan Rajeg/Jenis*	5 jenis	5 jenis	1.549.558.800,00	1.540.252.368,00	1.662.008.868,00	112.450.068,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	KECAMATAN RAJEG
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik												

		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	66.261.000,00	66.261.000,00	66.261.000,00	0,00	Kab. Tangerang, Rajeg, Sukatani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	KECAMATAN RAJEG
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor												
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	311.268.000,00	311.268.000,00	344.868.000,00	33.600.000,00	Kab. Tangerang, Rajeg, Sukatani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	KECAMATAN RAJEG
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/Jenis*	5 Jenis	5 Jenis	2.052.182.750,00	2.005.689.560,00	2.005.689.560,00	-46.493.190,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	KECAMATAN RAJEG
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	5 Unit	40.000.000,00	4.050.000,00	4.050.000,00	-35.950.000,00	Kab. Tangerang, Rajeg, Sukatani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	KECAMATAN RAJEG
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya												

		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	5 Unit	200.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-150.000.000,00	Kab. Tangerang, Rajeg, Sukatani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	KECAMATAN RAJEG
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara Persentase pemenuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik**	**100 100 % persen**	**100 100 % persen**	**6.094.838.650,00**	**15.282.845.960,00**	**15.646.498.590,00**	**-6.094.838.650,00**					
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar*	100 %	100 %	88.168.800,00	112.845.960,00	406.498.590,00	318.329.790,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	KECAMATAN RAJEG
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan												
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	36.817.160,00	32.100.060,00	-17.899.940,00	Kab. Tangerang, Rajeg, Sukatani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	KECAMATAN RAJEG
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase pemenuhan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan**	**100 %**	**100 %**	**2.567.712.500,00**	**4.445.584.700,00**	**4.179.430.300,00**	**-2.567.712.500,00**					

7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan/pemberdayaan*	5 kelompok	5 kelompok	1.317.040.000,00	1.992.276.000,00	1.903.604.000,00	586.564.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Meningkatkan Perekonomian Masyarakat	KECAMATAN RAJEG
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan												
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	467.040.000,00	502.099.000,00	502.099.000,00	35.059.000,00	Kab. Tangerang, Rajeg, Sukatani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Meningkatkan Perekonomian Masyarakat	KECAMATAN RAJEG
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan												
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	20 Unit	20 Unit	750.000.000,00	900.000.000,00	900.000.000,00	150.000.000,00	Kab. Tangerang, Rajeg, Sukatani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Meningkatkan Perekonomian Masyarakat	KECAMATAN RAJEG
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan												
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	100.000.000,00	590.177.000,00	501.505.000,00	401.505.000,00	Kab. Tangerang, Rajeg, Sukatani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Meningkatkan Perekonomian Masyarakat	KECAMATAN RAJEG
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**-**	-	**-**	**96.473.000,00**	**87.447.000,00**	**57.640.000,00**	**-96.473.000,00**					

7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah kegiatan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan/Kali*	4 kali	4 kali	96.473.000,00	87.447.000,00	57.640.000,00	-38.833.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	KECAMATAN RAJEG
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan												
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	4 Laporan	46.371.000,00	31.296.000,00	21.896.000,00	-24.475.000,00	Kab. Tangerang, Rajeg, Sukatani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	KECAMATAN RAJEG
J U M L A H					**19.385.592.170,00**	**31.449.254.733,00**	**31.684.588.030,00**	**12.298.995.860,00**					

BAB V
PENUTUP

Dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, maka diharapkan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang Tahun 2025 dapat digunakan sebagai pedoman kerja bagi aparatur Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang sesuai dengan Visi dan Misi yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.

Pencapaian target kinerja yang belum sesuai dikarenakan oleh beberapa faktor penyebab, oleh karena itu untuk tahun berikutnya diharapkan bagi setiap Perangkat Daerah sebagai Tim Penyusun Renja dan Bappeda sebagai Tim Verifikator agar bisa mengatasi hambatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta dapat menyelaraskan program dan kegiatan yang sudah direncanakan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dan disepakati.

Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2025, Rencana Kerja (Renja) juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang. Rencana Kerja (Renja) juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para Pimpinan dan seluruh staf Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang Tahun 2025 adalah Dokumen Perencanaan Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2025 Baik Sebelum Maupun Setelah Perubahan, Renja ini diharapkan mampu menjadi acuan dan pedoman Penyelenggaraan Program dan Kegiatan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang pada Tahun 2025 agar sesuai dengan Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan yang ditetapkan.

Dengan adanya Renja Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan.

Dalam penyusunan Rencana Kerja ini diharapkan kedepan nanti fungsi pengawasan dan pengendalian dalam proses penyesunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dapat tercapai, terpenuhinya kinerja pegawai dalam melaksanakan tugas dan kegiatan yang sudah direncanakan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan, terpenuhinya pencapaian keselarasan antara program dan kegiatan, serta optimalisasi pencapaian sasaran pelaksanaan dan pendanaan program dan kegiatan.

Melalui Rencana Kerja (Renja) ini diharapkan agar setiap aparatur yang mendukungnya, mampu melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala guna meningkatkan capaian kinerja yang lebih baik melalui upaya memahami tugas dan meningkatkan pelaksanaannya dengan penuh tanggungjawab dan kerja keras. Akhir kata, Semoga Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2025 ini dapat bermanfaat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

43. Kecamatan Sepatan

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan tahunan yang mengalami penyesuaian terhadap dokumen Renja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan sebelumnya. Renja Perubahan disusun sebagai respons atas dinamika dan perkembangan aktual yang terjadi selama tahun berjalan, baik yang bersumber dari perubahan kebijakan nasional maupun daerah, perubahan target kinerja, kondisi fiskal, maupun keadaan luar biasa seperti bencana atau krisis ekonomi. Dokumen ini bertujuan untuk memastikan fleksibilitas dalam pelaksanaan pembangunan daerah agar tetap relevan dan adaptif terhadap kebutuhan yang berkembang.

Proses penyusunan Renja Perubahan Kecamatan Sepatan Tahun 2025 dimulai dengan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun berjalan, serta identifikasi perubahan-perubahan strategis yang memerlukan penyesuaian. Proses ini juga mempertimbangkan hasil forum koordinasi perangkat daerah, pembahasan internal lintas bidang, serta masukan dari masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Penyusunan Renja Perubahan harus tetap mengacu pada arah kebijakan dan prioritas pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan dan selaras dengan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sepatan yang menjadi acuan jangka menengah.

Renja Perubahan Kecamatan Sepatan Tahun 2025 memiliki keterkaitan erat dengan dokumen perencanaan lainnya, seperti RKPD Perubahan sebagai dokumen induk tahunan, serta tetap menjamin kesinambungan terhadap Renstra Perangkat Daerah yang berlaku untuk periode lima tahunan. Selain itu, Renja Perubahan juga perlu disinergikan secara vertikal dengan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L), serta Renja Pemerintah Provinsi atau Kabupaten/Kota lainnya, guna menjamin integrasi pembangunan lintas sektor dan wilayah secara harmonis.

Sebagai tindak lanjut, Renja Perubahan Kecamatan Sepatan Tahun 2025 menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA-P) Kecamatan Sepatan Tahun 2025 yang selanjutnya akan digunakan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD-P). Dengan demikian, keberadaan Renja Perubahan Kecamatan Sepatan Tahun 2025 menjadi instrumen penting dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah secara responsif, akuntabel, dan efisien di tengah perubahan situasi yang terjadi.

1.2 LANDASAN HUKUM

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja Perubahan Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 184, Tambahan Lembar Negara republik Indonesia Nomor 2000 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

b. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/ atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan;
c. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
f. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Mencabut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011);
i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
k. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
l. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang;
m. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang Tahun 2011-2031;
n. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah;
o. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 33 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Kecamatan Sepatan Tahun 2025 dimaksudkan sebagai penyesuaian terhadap dokumen Renja Kecamatan Sepatan Tahun 2025 yang telah ditetapkan sebelumnya. Penyesuaian ini dilakukan guna merespons dinamika pembangunan dan kondisi aktual yang terjadi selama pelaksanaan tahun berjalan, baik dari sisi kebijakan, perubahan kebutuhan masyarakat, ketersediaan anggaran, maupun perkembangan situasi eksternal yang berdampak terhadap capaian program dan kegiatan Kecamatan Sepatan. Dengan demikian, dokumen Renja Perubahan ini menjadi dasar yang sah dalam merumuskan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA-P) serta mendukung penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun 2025.

Penyusunan Renja Perubahan Kecamatan Sepatan Tahun 2025 bertujuan untuk:

1. Menyesuaikan program dan kegiatan kecamatan dengan arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam RKPD Perubahan Kabupaten Tangerang Tahun 2025.
2. Mengakomodasi perubahan prioritas dan kebutuhan masyarakat di wilayah Kecamatan Sepatan yang muncul selama pelaksanaan tahun anggaran 2025.
3. Menyesuaikan target kinerja dan kebutuhan anggaran, baik karena adanya perubahan asumsi dasar perencanaan, evaluasi kinerja, maupun adanya kondisi khusus atau darurat yang memerlukan penanganan segera.
4. Menjamin konsistensi dan kesinambungan perencanaan, agar pelaksanaan pembangunan tetap selaras dengan Renstra Kecamatan Sepatan serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan jangka menengah Kabupaten Tangerang.
5. Mendukung proses penyusunan RKA Perubahan dan RAPBD Perubahan, agar seluruh program dan kegiatan kecamatan dapat terakomodasi secara legal dan tepat sasaran dalam dokumen penganggaran.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sebagaimana telah dirumuskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dokumen Rencana Kerja Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2025 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II : EVALUASI RENCANA KERJA KECAMATAN SEPATAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II dan perkiraan capaian tahun berjalan, mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya

dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN SEPATAN

Pada bab ini berisi penjabaran program, kegiatan, dan sub kegiatan yang direncanakan beserta target kinerja dan jumlah dana yang dibutuhkan untuk mendanai program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisi uraian penutup yang terdiri atas catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI RENCANA KERJA KECAMATAN SEPATAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang memiliki susunan organisasi terdiri atas :

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Kecamatan Sepatan

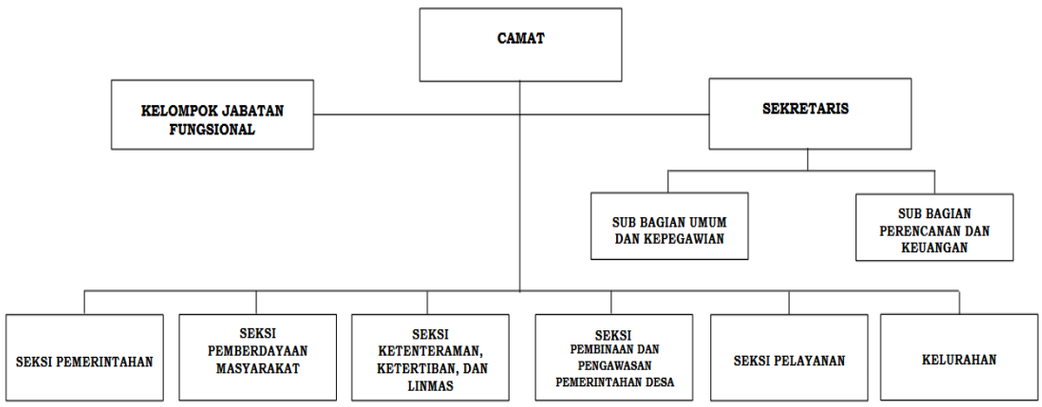

Dalam menyelenggarakan fungsinya sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang yang di atur dengan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 33 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas da Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang, susunan organisasi Kecamatan terdiri atas :

1. Camat;
2. Sekretariat Kecamatan, terdiri atas:
   a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
   b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
3. Seksi Pemerintahan;
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
5. Seksi Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan masyarakat;
6. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa;
7. Seksi Pelayanan;
8. Kelurahan; dan
9. Kelompok Jabatan Fungsional

Tercapainya suatu kegiatan sangat ditentukan oleh sumber daya manusia yang tersedia. Dalam rangka menyelenggarakan kegiatan-kegiatan Pemerintahan baik Pembangunan dan Pelayanan Kemasyarakatan lainnya di Wilayah Kecamatan Sepatan di bantu oleh personil/pegawai pada Kantor Kecamatan Sepatan, Adapun personil Kantor Kecamatan Sepatan berjumlah 60 orang terdiri dari PNS 26 orang, CPNS 1 orang, PPPK 2 orang, dan tenaga Magang 34 orang dengan susunan kepegawaian sebagai berikut:

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Kecamatan Sepatan

No	Uraian	Laki-laki	Perempuan	Total
1	Jumlah Pegawai			

	PNS	19	7	26
	CPNS	1	-	1
	NON ASN	22	12	34
	Jumlah	42	19	61
2	Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan:			
	Golongan IV	4	1	5
	Golongan III	11	6	17
	Golongan II	4	-	4
	Golongan I	1	-	1
	NON ASN	22	12	34
	Jumlah	43	19	61

Sumber : simasn.tangerangkab.go.id

2.2 Analisis Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun Berkenaan

Keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan pada Kecamatan Sepatan sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 ditentukan dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan RKPD tahun bersangkutan dan APBD Kabupaten Tangerang, dengan menggunakan tabel Penetapan Kinerja, Pengukuran Kegiatan dan Pengukuran Pencapaian Sasaran dilakukan pengukuran kinerja untuk tahun anggaran 2025 diperoleh hasil capaian kinerja Kecamatan Sepatan sebesar 50,12% dari tahun anggaran berjalan dengan target capaian kinerja 100% tersebut, dilihat dari capaian kinerja dapat dinilai tingkat keberhasilan dalam pencapaian kinerja.

Kecamatan Sepatan menyadari bahwa masih ada kekurangan dan kelemahan yang harus diperbaiki dan dilakukan untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi terhadap apa yang telah dilaksanakan guna mengetahui penyebab kekurangan dan kelemahan tersebut sebagai umpan balik/feed back dari apa yang telah dan akan dilaksanakan, evaluasi Penetapan Kinerja, Pengukuran Kegiatan dan Pengukuran Pencapaian Sasaran.

2.2.1 Capaian Kinerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2025

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Perangkat Daerah melalui Keputusan Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang. Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang Tahun 2025

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Definisi Operasional	Satuan	Target
1	2	3	4	5	6
1	Mewujudkan Birokrasi yang Responsif, Akuntabel dan Inovatif	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	89.80

Dari sebanyak 1 (satu) sasaran dengan indikator yang diperjanjikan didukung oleh jumlah Program sebanyak 6 (enam) Program yang berkaitan langsung dengan pencapaian kinerja dan didukung oleh anggaran belanja sebesar Rp25.898.072.849,00.

2.2.2 Realisasi Program/Kegiatan sampai dengan Triwulan II Tahun 2025

Realisasi program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kecamatan Sepatan sampai dengan Triwulan II pada tahun 2025 yang meliputi 6 program, 13 kegiatan, 34 sub kegiatan dapat dilihat sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 2.3
Realisasi Program/Kegiatan sampai dengan Triwulan II Tahun 2025

URAIAN/PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**10.192.906.369,00**	**5.294.387.059,00**	**(4.898.519.310,00)**	**51,94**
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**105.456.600,00**	**38.331.800,00**	**(67.124.800,00)**	**36,35**
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	51.382.800,00	3.920.000,00	(47.462.800,00)	7,63
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	40.985.000,00	22.491.000,00	(18.494.000,00)	54,88
Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.088.800,00	11.920.800,00	(1.168.000,00)	91,08
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**7.115.285.666,00**	**3.684.000.473,00**	**(3.431.285.193,00)**	**51,78**
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.079.915.266,00	3.666.796.073,00	(3.413.119.193,00)	51,79
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	35.370.400,00	17.204.400,00	(18.166.000,00)	48,64
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**75.777.600,00**	**55.255.000,00**	**(20.522.600,00)**	**72,92**
Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	25.815.000,00	5.700.000,00	(20.115.000,00)	22,08
Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	49.962.600,00	49.555.000,00	(407.600,00)	99,18
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	**601.896.700,00**	**315.155.300,00**	**(286.741.400,00)**	**52,36**
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	8.561.000,00	8.561.000,00	0,00	100
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	295.253.700,00	121.275.000,00	(173.978.700,00)	41,07
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	14.771.000,00	14.771.000,00	0,00	100
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	79.556.000,00	74.697.300,00	(4.858.700,00)	93,89
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	21.591.000,00	15.816.000,00	(5.775.000,00)	73,25
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	96.930.000,00	41.465.000,00	(55.465.000,00)	42,78
Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	49.920.000,00	26.850.000,00	(23.070.000,00)	53,79
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35.314.000,00	11.720.000,00	(23.594.000,00)	33,19
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**1.459.022.608,00**	**723.526.486,00**	**(735.496.122,00)**	**49,59**
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	269.591.040,00	111.840.986,00	(157.750.054,00)	41,49
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.189.431.568,00	611.685.500,00	(577.746.068,00)	51,43
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**835.467.195,00**	**478.118.000,00**	**(357.349.195,00)**	**57,23**

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	74.199.984,00	32.650.000,00	(41.549.984,00)	44,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	191.204.136,00	50.824.000,00	(140.380.136,00)	26,58
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	31.950.000,00	9.950.000,00	(22.000.000,00)	31,14
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	538.113.075,00	384.694.000,00	(153.419.075,00)	71,49
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**12.973.055.000,00**	**6.420.642.000,00**	**(6.552.413.000,00)**	**49,49**
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	**525.385.000,00**	**198.248.000,00**	**(327.137.000,00)**	**37,73**
Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	525.385.000,00	198.248.000,00	(327.137.000,00)	37,73
Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	**12.447.670.000,00**	**6.222.394.000,00**	**(6.225.276.000,00)**	**49,99**
Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12.447.670.000,00	6.222.394.000,00	(6.225.276.000,00)	49,99
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**2.185.481.080,00**	**1.165.089.880,00**	**(1.020.391.200,00)**	**53,31**
Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**1.410.696.680,00**	**794.514.880,00**	**(616.181.800,00)**	**56,32**
Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	63.780.600,00	63.540.000,00	(240.600,00)	99,62
Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1.346.916.080,00	730.974.880,00	(615.941.200,00)	54,27
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	**774.784.400,00**	**370.575.000,00**	**(404.209.400,00)**	**47,83**
Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan	19.155.200,00	19.150.000,00	(5.200,00)	99,97
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	533.940.200,00	261.500.000,00	(272.440.200,00)	48,98
Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	221.689.000,00	89.925.000,00	(131.764.000,00)	40,56
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**172.717.000,00**	**75.985.000,00**	**(96.732.000,00)**	**43,99**
Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**172.717.000,00**	**75.985.000,00**	**(96.732.000,00)**	**43,99**
Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	172.717.000,00	75.985.000,00	(96.732.000,00)	43,99
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**244.946.400,00**	**11.500.000,00**	**(233.446.400,00)**	**4,69**
Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	**244.946.400,00**	**11.500.000,00**	**(233.446.400,00)**	**4,69**
Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar	197.401.000,00	11.500.000,00	(185.901.000,00)	5,83

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				
Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	47.545.400,00	0,00	(47.545.400,00)	0,00
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**128.967.000,00**	**12.194.000,00**	**(116.773.000,00)**	**9,46**
Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**128.967.000,00**	**12.194.000,00**	**(116.773.000,00)**	**9,46**
Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	103.713.000,00	8.574.000,00	(95.139.000,00)	8,27
Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	7.670.000,00	0,00	(7.670.000,00)	0,00
Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	17.584.000,00	3.620.000,00	(13.964.000,00)	20,59
JUMLAH BELANJA DAERAH	**25.898.072.849,00**	**12.979.797.939,00**	**(12.918.274.910,00)**	**50,12**

Tabel 2.4
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/kota
Renja Perangkat Daerah Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang
Periode Pelaksanaan : Tahun 2025

Nama OPD : Kecamatan Sepatan

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dari Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Rentra PD sd Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sd tahun 2025		Unit PD Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6+12		14 = 13/5*100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	100	11.246.405.088	100	9.700.307.288	100	10.307.878.569	25%	2.518.229.894		2.473.833.668		-		-	25%	4.992.063.562	10025%	14.692.370.850	100,25%	130,64%	Kecamatan Sepatan
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen perencanaan dan Pelaporan	100	222.649.875	100	92.421.400	100	137.659.400	25%	25.663.800		10.624.000		-		-	25%	36.287.800	10025%	128.709.200	100,25%	57,81%	Kecamatan Sepatan
		Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	88.034.625	4	25.787.100	2	69.357.600	0	-		2.460.000					0	2.460.000	4	28.247.100	80,00%	32,09%	Kecamatan Sepatan
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	61.299.000	4	45.146.200	4	51.209.000	1	16.736.000		5.755.000					1	22.491.000	5	67.637.200	500,00%	110,34%	Kecamatan Sepatan
		Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	73.316.250	2	21.488.100	4	17.092.800	1	8.927.800		2.409.000					1	11.336.800	3	32.824.900	300,00%	44,77%	Kecamatan Sepatan
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Hasil : Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	6.917.636.250	100	6.218.495.097	100	7.125.660.666	28%	1.813.394.726		1.848.678.995		-		-	28%	3.662.073.721	100,28	9.880.568.818	100,28%	142,83%	Kecamatan Sepatan
		Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35	6.879.600.000	35	6.185.269.297	35	7.079.915.266	35	1.796.190.326		1.848.678.995					29	3.644.869.321	64	9.830.138.618	182,86%	142,89%	Kecamatan Sepatan

		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semestera n SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD	1	38.036.250	2	33.225.800	1	45.745.400	1	17.204.400		-					1	17.204.400	3	50.430.200	300,00%	132,58%	Kecamatan Sepatan
		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Hasil : Prosentase aparatur yang meningkat kapasitasnya	100	105.037.500	100	87.153.000	100	88.026.000	0	-		55.255.000			-		-	-	55.255.000	100,00	42.408.000	100,00%	135,58%	Kecamatan Sepatan
		Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	50	47.707.500	50	72.600.000	32	25.815.000	0	-		5.700.000						0	5.700.000	50	78.300.000	100,00%	164,13%	Kecamatan Sepatan
		Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan	40	57.330.000	40	14.553.000	34	62.211.000	0	-		49.555.000						0	49.555.000	40	64.108.000	100,00%	111,82%	Kecamatan Sepatan
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Hasil : Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	1.056.512.738	100	896.158.900	100	662.042.700	13%	142.841.100		153.140.500			-		-	13%	295.981.600	100,13	1.192.140.500	100,13%	112,84%	Kecamatan Sepatan
		Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6	9.371.250	5	12.620.000	8	8.561.000	8	8.561.000		-					8	8.561.000	13	21.181.000	216,67%	226,02%	Kecamatan Sepatan
		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	16	636.232.904	16	529.397.400	12	295.253.700	3	48.400.000		69.054.000					3	117.454.000	19	646.851.400	118,75%	101,67%	Kecamatan Sepatan
		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10	17.419.500	10	19.198.000	10	14.771.000	10	14.771.000		-					10	14.771.000	20	33.969.000	200,00%	195,01%	Kecamatan Sepatan
		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	26	145.336.125	26	88.726.700	24	85.570.000	6	29.011.100		44.376.000					6	73.387.100	32	162.113.800	123,08%	111,54%	Kecamatan Sepatan
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7	30.475.580	7	27.012.000	7	27.181.000	3	12.683.000		2.273.000					3	14.956.000	10	41.968.000	142,86%	137,71%	Kecamatan Sepatan
		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan yang Disediakan	7	49.827.487	7	36.792.000	5	96.930.000	5	14.655.000		21.057.500					5	35.712.500	12	72.504.500	171,43%	145,51%	Kecamatan Sepatan
		Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	24	91.226.142	24	66.800.000	24	63.060.000	24	9.960.000		11.310.000					24	21.270.000	48	88.070.000	200,00%	96,54%	Kecamatan Sepatan
		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2	76.623.750	2	115.612.800	2	70.716.000	1	4.800.000		5.070.000					1	9.870.000	3	125.482.800	150,00%	163,76%	Kecamatan Sepatan

		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Keluaran : Jumlah dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	71.662.500	0	-	0	-	-	-		-	-	-	-	-	0%	-	-	-	0,00%	0,00%	Kecamatan Sepatan
		Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel	2	71.662.500	0	-	0	-	0	-		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00%	0,00%	Kecamatan Sepatan
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Keluaran : Jumlah dokumen Jasa Penunjang	100	1.510.086.241	100	1.551.912.891	100	1.459.022.608	25%	268.508.268		363.238.173			-		-	25%	631.746.441	100,25	2.183.659.332	100,25%	144,60%	Kecamatan Sepatan
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	25.000.000	0	-	0	-	0	-		-						0	-	0	-	0,00%	0,00%	Kecamatan Sepatan
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2	253.574.999	2	249.794.891	2	269.591.040	2	50.673.268		35.356.173						2	86.029.441	4	335.824.332	200,00%	132,44%	Kecamatan Sepatan
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayamam Umum Kantor	12	1.231.511.242	12	1.302.118.000	12	1.189.431.568	12	217.835.000		327.882.000						12	545.717.000	24	1.847.835.000	200,00%	150,05%	Kecamatan Sepatan
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Keluaran : Jumlah dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	1.362.819.984	100	854.166.000	-	835.467.195	25%	267.822.000		42.897.000			-		-	25%	310.719.000	100,25	1.164.885.000	100,25%	85,48%	Kecamatan Sepatan
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5	196.245.000	5	152.680.000	5	74.199.984	5	7.780.000		15.980.000						4	23.760.000	9	176.440.000	180,00%	89,91%	Kecamatan Sepatan
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6	41.895.000	2	34.050.000	2	191.204.136	2	12.580.000		23.917.000						1	36.497.000	3	70.547.000	50,00%	168,39%	Kecamatan Sepatan
		Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7	56.377.440	7	40.300.000	7	31.950.000	1	3.500.000		3.000.000						1	6.500.000	8	46.800.000	114,29%	83,01%	Kecamatan Sepatan
		Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilita si	4	1.068.302.544	5	627.136.000	3	538.113.075	2	243.962.000		-						2	243.962.000	7	871.098.000	175,00%	81,54%	Kecamatan Sepatan
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar	92,45	614.064.937	91,35	414.627.000	91,35	547.416.000	25%	63.685.000		124.949.000			-		-	25%	188.634.000	91,60	603.261.000	99,08%	98,24%	Kecamatan Sepatan
			Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik Kecamatan Sepatan	93	7.166.250.000	93	13.088.449.000	93	12.448.560.000	25%	1.771.785.000		4.450.609.000			-		-	25%	6.222.394.000	93,25	19.310.843.000	100,27%	269,47%	

		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Keluaran : Pemenuhan sarana dan prasarana Paten di Kecamatan	92,45	614.064.937	91,35	414.627.000	91,35	547.416.000	25%	63.685.000		124.949.000		-		-	25%	188.634.000	91,60	603.261.000	99,08%	98,24%	Kecamatan Sepatan
		Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2	614.064.937	2	414.627.000	2	547.416.000	2	63.685.000		124.949.000					2	188.634.000	4	603.261.000	200,00%	98,24%	Kecamatan Sepatan
		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Keluaran : Jumlah infrastruktur yang dipelihara	93	7.166.250.000	93	13.088.449.000	93	12.448.560.000	25%	1.771.785.000		4.450.609.000		-		-	25%	6.222.394.000	93,25	19.310.843.000	100,27%	269,47%	Kecamatan Sepatan
		Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah dokumen koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum	60	7.166.250.000	112	13.088.449.000	60	12.448.560.000	19	1.771.785.000		4.450.609.000					19	6.222.394.000	131	19.310.843.000	218%	269,47%	Kecamatan Sepatan
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/ pemberdayaan	90	2.417.782.500	85	1.735.351.400	85	2.363.216.580	20%	635.468.000		448.950.600		-		-	20%	1.084.418.600	85,20	2.819.770.000	94,67%	116,63%	Kecamatan Sepatan
		Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Hasil : Persentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	90	1.323.000.000	85	785.867.800	85	1.538.576.180	20%	605.658.000		144.730.600		-		-	20%	750.388.600	85,20	1.536.256.400	94,67%	116,12%	Kecamatan Sepatan
		Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10	77.175.000	10	57.667.700	10	63.780.600	10	63.540.000		-					10	63.540.000	20	121.207.700	200,00%	157,06%	Kecamatan Sepatan
		Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7	1.245.825.000	7	728.200.100	7	1.474.795.580	7	542.118.000		144.730.600					7	686.848.600	14	1.415.048.700	200,00%	113,58%	Kecamatan Sepatan
		Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Hasil : Persentase Lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	90	27.562.500	0	-	-	-		-		-		-		-	0%	-	-	-	0,00%	0,00%	Kelurahan Sepatan
		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Dokumen Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4	27.562.500	0	-		-		-		-					0	-	0	-	0,00%	0,00%	Kelurahan Sepatan

		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Hasil : Persentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	90	1.067.220.000	90	949.483.600	85	824.640.400	8%	29.810.000		304.220.000			-		-	8%	334.030.000	90,08	1.283.513.600	100,09%	120,27%	Kelurahan Sepatan
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4	19.845.000	4	13.666.000	4	19.155.200	4	19.150.000		-						4	19.150.000	8	32.816.000	200,00%	165,36%	Kelurahan Sepatan
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15	826.875.000	15	612.160.000	12	533.940.200		-		261.500.000						0	261.500.000	15	873.660.000	100,00%	105,66%	Kelurahan Sepatan
		Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2	220.500.000	2	323.657.600	6	271.545.000	2	10.660.000		42.720.000						2	53.380.000	4	377.037.600	200,00%	170,99%	Kelurahan Sepatan
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	100	492.000.000	100	269.420.000	110	240.554.000	26%	20.508.000		39.575.000			-		-	26%	60.083.000	100,26	329.503.000	100,26%	66,97%	Kecamatan Sepatan
		Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Hasil : Persentase laporan trantibum yang di fasilitasi	100	492.000.000	100	269.420.000	100	240.554.000	26%	20.508.000		39.575.000			-		-	26%	60.083.000	100,26	329.503.000	100,26%	66,97%	Kecamatan Sepatan
		Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4	492.000.000	4	269.420.000	4	240.554.000	4	20.508.000		39.575.000						4	60.083.000	8	329.503.000	200,00%	66,97%	Kecamatan Sepatan
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	75	165.375.000	75	359.640.120	60	284.742.400	14%	5.750.000		-			-		-	14%	5.750.000	75,14	365.390.120	100,19%	220,95%	Kecamatan Sepatan
		Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti pembinaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	50	165.375.000	50	359.640.120	50	284.742.400	14%	5.750.000		-			-		-	14%	5.750.000	50,14	365.390.120	100,28%	220,95%	Kecamatan Sepatan

		Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	50	110.250.000	50	250.944.000	50	227.897.000	50	5.750.000			-					50	5.750.000	100	256.694.000	200,00%	232,83%	Kecamatan Sepatan
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	7	55.125.000	4	108.696.120	7	56.845.400	7	-			-					7	-	11	108.696.120	157,14%	197,18%	Kecamatan Sepatan
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa dengan laporan keuangan dan administrasi baik	95	612.663.000	100	173.909.000	90	164.565.000	4%	9.170.000			3.024.000			-	-	4%	12.194.000	100,04	186.103.000	105,31%	30,38%	Kecamatan Sepatan
		Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Keluaran : Jumlah Desa yang difasilitasi	7	612.663.000	7	173.909.000	90	164.565.000	4%	9.170.000			3.024.000			-	-	4%	12.194.000	7,04	186.103.000	100,57%	30,38%	Kecamatan Sepatan
		Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	7	209.475.000	7	146.483.000	7	129.808.000	2	5.550.000			3.024.000					7	8.574.000	14	155.057.000	200,00%	74,02%	Kecamatan Sepatan
		Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam rangka Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa/Desa	7	100.000.000	0	-	0	-	0	-			-					0	-	0	-	0,00%	0,00%	Kecamatan Sepatan
		Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	7	165.375.000	7	8.216.000	7	10.380.000	0	-			-					0	-	7	8.216.000	100,00%	4,97%	Kecamatan Sepatan
		Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	7	82.687.500	7	19.210.000	7	24.377.000	7	3.620.000			-					7	3.620.000	14	22.830.000	200,00%	27,61%	Kecamatan Sepatan

		Sub Kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	7	55.125.500	0	-	-	-	0	-		-					0	-	0	-	0,00%	0,00%	Kecamatan Sepatan
Rata-rata capaian kinerja (Rp)					22.714.540.525		25.741.703.808		26.356.932.549		5.024.595.894		7.540.941.268			-		-	0	12.565.537.162	168,65	38.307.240.970		168,65%	
Predikat kinerja																								
Faktor pendukung keberhasilan kinerja :																								
Faktor penghambat pencapaian kinerja :																								

Berdasarkan tabel 2.4 di atas, berikut analisis dari tabel tersebut yang realisasi telah memenuhi target kinerja :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, capaian kinerja tercapai semua kegiatan terserap dengan baik dan berjalan semua;
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, capaian kinerja tercapai semua kegiatan terserap dengan baik dan berjalan semua;
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, capaian kinerja tercapai semua kegiatan terserap dengan baik dan berjalan semua;
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, capaian kinerja tercapai semua kegiatan terserap dengan baik dan berjalan semua;
5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, capaian kinerja tercapai semua kegiatan terserap dengan baik dan berjalan semua;
6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah capaian kinerja tercapai semua kegiatan terserap dengan baik dan berjalan semua;
7. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat, capaian kinerja tercapai semua kegiatan terserap dengan baik dan berjalan semua;
8. Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum capaian kinerja tercapai semua kegiatan terserap dengan baik dan berjalan semua;
9. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, capaian kinerja tercapai semua kegiatan terserap dengan baik dan berjalan semua;
10. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan, capaian kinerja tercapai semua kegiatan terserap dengan baik dan berjalan semua;
11. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, capaian kinerja tercapai semua kegiatan terserap dengan baik dan berjalan semua;
12. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah capaian kinerja tercapai semua kegiatan terserap dengan baik dan berjalan semua;
13. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, capaian kinerja tercapai semua kegiatan terserap dengan baik dan berjalan semua.

Sebagaimana penjelasan pada tabel diatas dan untuk lebih jelasnya perihal hasil evaluasi keuangan dan fisik Rencana Kerja Kecamatan Sepatan dari berbagai program, kegiatan dan sub kegiatan akan disajikan dalam Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2025 sampai dengan Semester I.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang

2.3.1 Tingkat Pelayanan dan Hal Kritis Terkait Pelayanan

Otonomi Daerah merupakan upaya mewujudkan Pemerintahanan yang Good Governance dan Clean Governance. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan aparatur yang mempunyai integritas, akuntabilitas, dan

transparansi yang tinggi. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang harus mampu menjawab setiap tantangan, mengambil serta menerapkan peluang yang ada untuk mendukung pencapaian Renstra 2025-2029 Kabupaten Tangerang, dalam hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Misi 5 : Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, demokratis, dan partisipatif.

2.3.2 Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi dalam Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi

a. Permasalahan pelayanan perangkat daerah antara lain:
   1. Kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang;
   2. Pembinaan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi masih belum maksimal;
   3. Regulasi pelayanan masih tumpang tindih;
   4. Sarana dan prasarana pelayanan masih belum optimal;
   5. Pembangunan infrastruktur jalan masih terbatas dengan anggaran;
   6. Peran serta masyarakat masih minim;
   7. Fasilitasi terhadap UMKM masih belum maksimal;
   8. Tata kelola SDM dalam hal pemenuhan, beban kerja dan peningkatan kompetensi belum optimal;
   9. Upaya kolaborasi dengan instansi vertikal masih perlu ditingkatkan;
   10. Forum koordinasi wilayah masih perlu ditingkatkan untuk menemukan dan mengantisipasi permasalahan dan kebutuhan masyarakat.

b. Faktor penghambat untuk pencapaian Misi 1 antara lain:
   1. Belum maksimalnya kolaborasi antar perangkat daerah;
   2. Belum maksimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah, dikarenakan keterbatasan anggaran;
   3. Belum optimalnya adaptasi setiap kebijakan baru;
   4. Belum optimalnya upaya pembinaan SDM baik internal perangkat daerah, maupun perangkat desa;
   5. Masih belum optimalnya analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja terhadap tugas tambahan diluar tugas pokok;
   6. Masih terbatasnya jumlah SDM Perangkat Daerah;
   7. Belum maksimalnya tindak lanjut atas hasil pembinaan, pengawasan, dan pengendalian oleh instansi terkait;
   8. Belum maksimalnya pemanfaatan kader PKK;
   9. Belum adanya analisa terhadap pengembangan fasiilitas terhadap UMKM;
   10. Belum optimalnya kemampuan tata kelola manajemen perkantoran dan kegiatan;
   11. Belum optimalnya tata kelola asset dan identifikasi kebutuhan asset.

c. Faktor Pendorong untuk pencapaian Misi 1 antara lain:
   1. Tersedianya berbagai regulasi perihal pelayanan

publik;
2. Maraknya perkembangan teknologi yang dapat diadaptasi oleh perangkat daerah untuk pemenuhan tugas dan fungsi;
3. Kuatnya APBD untuk mendorong ketercapaian target;
4. Rutinnya penyusunan Anjab dan ABK;
5. Banyaknya kualitas SDM yang berada di usia muda;
6. Cakapnya kader-kader PKK dalam melaksanakan tugas dan fungsi;
7. Rutinnya pelaksanaan koordinasi dengan instansi vertikal dan horizontal;
8. Tersedianya regulasi untuk pencapaian tata kelola pemerintahan yang baik;
9. Banyaknya media dan sarana yang dapat memberikan kesempatan perangkat daerah berpartisipasi terhadap kebutuhan publik.

2.3.3 Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang, yaitu :

a. Tantangan antara lain:
1. Pemenuhan SDM yang cakap sesuai dengan tugas dan fungsinya;
2. Integrasi sistem informasi;
3. Pengembangan fasilitas pelayanan;
4. Adaptasi dengan perkembangan teknologi;
5. Pengembangan layanan publik sesuai tugas dan fungsi;
6. Optimalisasi kegiatan pembinaan pegawai;
7. Fasilitasi kebetuhan dan keperluan bagi UMKM;
8. Heterogenitas penduduk Kecamatan Sepatan yang menuntut kebutuhan yang beragam;
9. Optimaliasi pengembangan dan pemanfaatan data pelayanan;
10. Optimalisasi dan sinkronisasi dokumen perencanaan;
11. Pemanfaatan Forum legal yang ada di wilayah Kecamatan;
12. Pemenuhan ketentraman dan ketertiban umum
13. Prioritas pemenuhan inftastruktur;
14. Prioritas pemberdayaan masyarakat untuk menurunkan kemiskinan ekstrem;
15. Prioritas penurunan angka stunting;
16. Penguatan SDM Kecamatan;
17. Penguatan Sistem Pelayanan.

b. Peluang antara lain:
1. Dukungan anggaran dari pemerintah kabupaten melalui APBD;
2. Kemudahan akses teknologi dan informasi pelayanan;
3. Kemudahan akses teknologi dan informasi perencanaan;
4. Perbaikan berkelanjutan atas tata kelola pemerintahan;
5. Dukungan akses Pendidikan dan Pelatihan dari Instansi Vertikal bagi Aparatur Kecamatan;

6. Kerjasama yang kuat bersama instansi vertikal dan mitra;
7. Heterogenitas penduduk yang mampu membawa perbaikan dan pengembangan bagi pelayanan;
8. Dukungan instansi vertikal yang besar melalui koordinasi dan fasilitasi setiap kebutuhan masyarakat;

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan diprioritaskan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah tersebut di masa yang akan datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal ini jika tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat. Pada tahun 2025-2029 pelaksanaan fungsi dan tugas Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang diprioritaskan terhadap isu-isu strategis yaitu :

a. Penanganan Kemisikinan dan Pengangguran
   1. Masih kurangnya kegiatan usaha produktif dikalangan masyarakat;
   2. Kurang optimalnya kelompok usaha masyarakat untuk memecahkan ekonomi masyarakat;
   3. Kurangnya pembinaan kelompok UMKM Masyarakat;
   4. Kurangnya sarana dan prasarana yang berfokus pada kelompok UMKM;
   5. Lemahnya penguasaan teknologi informasi dalam mengembangkan pemasaran hasil-hasil UMKM;
   6. Kurangnya pelatihan-pelatihan bagi kelompok tenaga kerja usia produktif;
   7. Sulitnya akses permodalan;
   8. Belum optimalnya keberadaan Pasar Regional;
   9. Masih rendahnya pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan kurangnya pelatihan kepada masyarakat pelaku UMKM;
   10. Belum tersedianya data pelaku usaha yang akurat.
b. Peningkatan Kualitas dan Pemerataan Pelayanan Pendidikan, Kesehatan dan Sosial
   1. Kurangnya fasilitas prasaranan dan sarana Pendidikan formal khususnya Sekolah Dasar;
   2. Kurangnya pustu yang mudah dijangkau oleh masyarakat sekitar;
   3. Masih rendahnya tingkat pemahaman tentang Kesehatan dan Pola Hidup Bersih Sehat (PHBS);
   4. Belum lengkapnya alat kesehatan di setiap Posyandu;
   5. Kurangnya pembinaan pada organisasi-organisasi keagamaan, sosial dan kepemudaan serta ketentraman dan ketertiban umum;
   6. Pemerataan Infrastruktur dan Pembangunan Berkelanjutan;
   7. Belum terpadunyan pembangunan infrastruktur jalan dan saluran air sehingga menyebabkan pembuangan

air tidak teratur dan berpotensi banjir;
8. Masih rendahnya pembangunan infrastuktur;
9. Masih kurangnya tenaga ahli perencanaan konstruksi di Kecamatan;
10. Masih kurangnya penerangan jalan;
11. Pengelolaan Persampahan dan Lingkungan
12. Masih rendahnya pemahaman masyrakat terhadap pengelolaan persampahan dilingkungan masing-masing;
13. Masih terbatasnya tempat pembuangan sampah disetiap lingkungan;
14. Belum adanya sistem pengolahan sampah terpadu;
15. Masih kurangnya sarana dan prasaranan dalam hal pengolahaan dan pengelolaan sampah.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Perubahan

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Perubahan Kecamatan Sepatan Tahun Anggaran 2025 merupakan rencana kerja penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam arah kebijakan Rencana Strategis (Renstra) Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029 yang dijabarkan dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029. Rencana Kerja Perangkat Daerah Perubahan ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri dalan Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Pasal 343 ayat 1 menyatakan “Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi priorotas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan, dan/atau keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.”, sebagaimana dijabarkan dalam tabel ini.

Tabel 2.5
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Perubahan Tahun 2025
Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang

NO	Rancangan Awal RKPD (APBD 2025)					Hasil Analisa Kebutuhan (RKPD) Perubahan					
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Capaian Target	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Capaian Target	Pagu Indikatif	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	KECAMATAN					**Kecamatan**					
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
7.01.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
7.01.01.2.01.0001	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Sepatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	42.872.400,00	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Sepatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	51.382.800,00	
7.01.01.2.01.0006	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Sepatan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	45.848.000,00	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Sepatan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	40.985.000,00	
7.01.01.2.01.0007	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Sepatan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	24.841.600,00	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Sepatan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	13.088.800,00	
7.01.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
7.01.01.2.02.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Sepatan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35	6.831.495.346,00	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Sepatan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35	6.892.679.356,00	
7.01.01.2.02.0007	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan	Kec. Sepatan	Jumlah Laporan Keuangan	2	47.964.100,00	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan	Kec. Sepatan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/	2	35.370.400,00	

	Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			
7.01.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					
7.01.01.2.05.0002	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kec. Sepatan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	22	73.278.000,00	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kec. Sepatan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	22	25.815.000,00	
7.01.01.2.05.0011	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Sepatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50	14.340.000,00	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Sepatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50	49.962.600,00	
7.01.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah					Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah					
7.01.01.2.06.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Kec. Sepatan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5	8.263.000,00	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Kec. Sepatan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5	8.561.000,00	
7.01.01.2.06.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Sepatan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9	184.614.000,00	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Sepatan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9	360.086.000,00	
7.01.01.2.06.0003	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kec. Sepatan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10	15.848.700,00	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kec. Sepatan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10	14.771.000,00	
7.01.01.2.06.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Sepatan	Jumlah Paket Bahan Logistik	24	29.293.300,00	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Sepatan	Jumlah Paket Bahan Logistik	24	28.094.300,00	

			Kantor yang Disediakan					Kantor yang Disediakan			
7.01.01.2.06.0005	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec. Sepatan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4	27.159.000,00	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec. Sepatan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4	21.591.000,00	
7.01.01.2.06.0006	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kec. Sepatan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5	27.030.000,00	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kec. Sepatan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5	87.030.000,00	
7.01.01.2.06.0008	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec. Sepatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	24	64.080.000,00	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec. Sepatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	24	43.020.000,00	
7.01.01.2.06.0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Sepatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2	54.504.000,00	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Sepatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2	35.314.000,00	
7.01.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
7.01.01.2.08.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Sepatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3	206.251.095,00	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Sepatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3	208.858.840,00	
7.01.01.2.08.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Sepatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	15	906.594.000,00	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Sepatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	15	1.000.887.568,00	
7.01.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
7.01.01.2.09.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa	Kec. Sepatan	Jumlah Kendaraan	6	166.344.800,00	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa	Kec. Sepatan	Jumlah Kendaraan	6	74.199.984,00	

	Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			
7.01.01.2.09.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Sepatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1	40.629.000,00	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Sepatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1	191.204.136,00	
7.01.01.2.09.0006	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Sepatan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4	33.150.000,00	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Sepatan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4	31.950.000,00	
7.01.01.2.09.0009	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Sepatan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	453.227.625,00	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Sepatan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	538.113.075,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					
7.01.02.2.02	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan					Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan					
7.01.02.2.02.0003	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Sepatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2	163.350.000,00	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Sepatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2	130.424.000,00	
7.01.02.2.03	Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum					Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum					
7.01.02.2.03.0001	Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan	Kec. Sepatan	Jumlah dokumen koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal	40	3.373.115.000,00	Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan	Kec. Sepatan	Jumlah dokumen koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam	40	12.448.560.000,00	

	Prasarana Pelayanan Umum		yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum			Prasarana Pelayanan Umum		pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum			
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					
7.01.03.2.01	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa					Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa					
7.01.03.2.01.001	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. Sepatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10	65.226.800,00	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. Sepatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10	63.780.600,00	
7.01.03.2.01.003	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Sepatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10	1.099.959.780,00	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Sepatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10	1.346.916.080,00	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					
7.01.04.2.01	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					
7.01.04.2.01.0001	Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Sepatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	5	157.396.000,00	Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Sepatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	5	114.413.000,00	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					

7.01.05.2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah					Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah					
7.01.05.2.01.0001	Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kec. Sepatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	40	234.647.400,00	Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kec. Sepatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	40	197.401.000,00	
7.01.05.2.01.0008	Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec. Sepatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	3	57.080.400,00	Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec. Sepatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	3	47.545.400,00	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					
7.01.06.2.01	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					
7.01.06.2.01.0002	Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Sepatan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	7	152.652.000,00	Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Sepatan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	7	103.713.000,00	

7.01.06.2.01.0007	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Kec. Sepatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	7	8.785.000,00	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Kec. Sepatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	7	7.670.000,00	
7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kec. Sepatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	7	21.655.000,00	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kec. Sepatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	7	17.584.000,00	
	SUB UNIT KELURAHAN					SUB UNIT KELURAHAN					
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
7.01.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah					Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah					
7.01.01.2.06.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kel. Sepatan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9	117.482.700,00	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kel. Sepatan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9	135.167.700,00	
7.01.01.2.06.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kel. Sepatan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10	41.173.700,00	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kel. Sepatan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10	51.461.700,00	
7.01.01.2.06.0006	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kel. Sepatan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2	9.900.000,00	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kel. Sepatan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2	9.900.000,00	
7.01.01.2.06.0008	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kel. Sepatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	6.000.000,00	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kel. Sepatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	6.900.000,00	
7.01.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
7.01.01.2.08.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi,	Kel. Sepatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	2	67.422.200,00	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi,	Kel. Sepatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	2	60.732.200,00	

	Sumber Daya Air dan Listrik		Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			Sumber Daya Air dan Listrik		dan Listrik yang Disediakan			
7.01.01.2.08.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kel. Sepatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2	293.106.000,00	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kel. Sepatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2	303.744.000,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					
7.01.02.2.02	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan					Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan					
7.01.02.2.02.0003	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kel. Sepatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2	312.620.000,00	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan 2Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kel. Sepatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2	394.961.000,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kel. Sepatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4	19.335.200,00	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kel. Sepatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4	19.155.200,00	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kel. Sepatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9	568.869.200,00	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kel. Sepatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9	533.940.200,00	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kel. Sepatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan	6	256.005.000,00	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kel. Sepatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6	221.689.000,00	

			Masyarakat di Kelurahan								
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					
7.01.04.2.01	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					
7.01.04.2.01.0001	Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kel. Sepatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4	101.366.000,00	Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kel. Sepatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4	58.304.000,00	

2.4.1 Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah

Rancangan Awal Rencana Kerja Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2025 disusun berdasarkan evaluasi hasil Capaian Indikator Kinerja Tahun 2025 Triwulan II. Setiap seksi dan sub bagian melakukan penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun Anggaran 2025 berdasarkan penjabaran Rencana Strategis Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029 yang nomenklaturnya mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Dalam Rancangan Awal Rencana Kerja Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2025 yang disusun, alokasi anggaran dikelompokan berdasarkan program, seksi dan sub bagian, dan sumber anggaran.

1. Alokasi Anggaran Program

Tabel 2.6
Alokasi Anggaran Program Pada Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun Anggaran 2025

Kode	Nama Program	Pagu Hasil Input Ranwal Renja TA 2025	Persentase
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	10.192.906.369,00	39,36%
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	12.973.055.000,00	50,09%
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	2.185.481.080,00	8,44%
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	172.717.000,00	0,67%
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	244.946.400,00	0,95%
7.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	128.967.000,00	0,50%
Total		25.898.072.849,00	100,00%

Berdasarkan tabel diatas program dengan anggaran terbesar adalah Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Rp12.973.055.000,00 (Dua Belas Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Lima Puluh Lima Ribu Rupiah) atau 50,09% dari total pagu hasil input Rancangan Awal Rencana Kerja Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2025. Program tersebut memiliki anggaran terbesar karena terdapat sub kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum dengan total

anggaran sebesar Rp12.447.670.000,00 (Dua Belas Milyar Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) atau 50,09% dari total pagu hasil input Rancangan Awal Rencana Kerja Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2025.

2. Alokasi Anggaran Seksi dan Sub Bagian

Tabel 2.7
Alokasi Anggaran per Seksi dan Sub Bagian pada Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun Anggaran 2025

No	Kelompok Unit Kerja	Pagu Hasil Input Ranwal Renja TA 2025	Persentase
1	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	7.220.742.266,00	27,88%
2	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	2.972.164.103,00	11,48%
3	Seksi Pelayanan	12.973.055.000,00	50,09%
4	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	2.185.481.080,00	8,44%
5	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Perlindungan Masyarakat	172.717.000,00	0,67%
6	Seksi Pemerintahan	244.946.400,00	0,95%
7	Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	128.967.000,00	0,50%
Total		25.898.072.849,00	100,00%

Berdasarkan tabel diatas, seksi/sub bagian dengan anggaran terbesar adalah Seksi Pelayanan yaitu Rp12.973.055.000,00 (Dua Belas Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Lima Puluh Lima Ribu Rupiah), atau 50,09% dan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan yaitu Rp7.220.742.266,00 (Tujuh Milyar Dua Ratus Dua Puluh Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Ribu Dua Ratus Enam Puluh Enam Rupiah) atau 27,88% dari total pagu hasil input Rancangan Awal Rencana Kerja Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2025. Seksi Pelayanan memiliki anggaran terbesar kesatu karena terdapat Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum yang dialokasikan untuk anggaran belanja infrastruktur sesuai dengan kebutuhan dan usulan pokok pikiran yang ada di wilayah Kecamatan Sepatan. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan memiliki anggaran terbesar kedua karena terdapat sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN yang dialokasikan untuk anggaran belanja gaji dan tunjangan kinerja pegawai Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang sebesar Rp7.079.915.266,00 (Tujuh Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah) atau 29,07% dari total pagu hasil input Rancangan Awal Rencana Kerja Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran

2025.

3. Alokasi anggaran berdasarkan sumber anggaran

Tabel 2.8
Alokasi Anggaran per Sumber Anggaran pada Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun Anggaran 2025

No	Jenis Pagu	Pagu Hasil Input Ranwal Renja TA 2025	Persentase
1	APBD MURNI	25.898.072.849,00	100,00%
Total		25.898.072.849,00	100,00%

Berdasarkan tabel diatas, sumber anggaran pada Rancangan Awal Rencana Kerja Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2025 adalah sepenuhnya dibiayai oleh APBD Pemerintah Kabupaten Tangerang.

2.4.2 Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah

Pagu Indikatif Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025, bahwa Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang mendapatkan anggaran pagu indikatif sebesar Rp26.096.036.939,00 (Dua Puluh Enam Milyar Sembilan Puluh Enam Juta Tiga Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah) dengan rincian jenis belanja sebagai berikut :

Tabel 2.9
Pagu Indikatif Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2025

No	Jenis Belanja	Pagu Anggaran Perubahan TA 2025
1	Belanja Pegawai	Rp6.892.679.356,00
2	Belanja Barang/Jasa dan Modal	Rp19.203.357.583,00
Total		Rp26.096.036.939,00

Pagu indikatif Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2025 tersebut diinput dalam aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Modul Perencanaan (SIPD-RI), sesuai dengan instruksi Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang. Total anggaran Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang berdasarkan hasil input Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp26.096.036.939,00 (Dua Puluh Enam Milyar Sembilan Puluh Enam Juta Tiga Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah) dengan rincian hasil input sebagai berikut :

Tabel 2.10
Hasil Input Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja pada SIPD-RI Tahun Anggaran 2025

No	Jenis Belanja	Pagu Anggaran Perubahan TA 2025
1	Belanja Pegawai	Rp6.892.679.356,00
2	Belanja Barang/Jasa dan Modal	Rp19.203.357.583,00
Total		Rp26.096.036.939,00

Hasil input anggaran tersebut menjadi dasar Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2025 yang akan dijelaskan secara rinci pada Bab III.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan Program/Kegiatan yang dibahas didalam musrenbang mekanimesnya diawali dari penggalian gagasan dari tingkat Desa melibatkan unsur Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Unsur Perempuan dan Organisasi Kemasyarakatan sehingga menghasilkan usulan program yang di bawa ke forum Musrenbangdes. Melalui forum Musrenbangdes, skala prioritas usulan tingkat Desa/Kelurahan selanjutnya ditunjuk perwakilan dari Desa/Kelurahan untuk mengawal usulan tersebut di Forum Musrenbang Tingkat Kecamatan. Hasil Musrenbang Kecamatan merupakan skala prioritas program yang telah sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat serta isu-isu penting dari masing-masing Perangkat Daerah yang ada pada Unit Pelaksana Teknis di tingkat Kecamatan, sebagaimana prioritas usulan masalah pokok dan akar masalah Kecamatan Sepatan dijabarkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.11
Prioritas Urusan Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang
Tahun Anggaran 2025

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1	Belum Optimalnya Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Belum Optimalnya Penyelenggaraan Akuntabilitas Publik	Belum Tersedianya Database Rencana Pembangunan
			Masih minimnya pngetahuan aparatur tentang akuntabilitas publik
		Belum Optimalnya Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Penerapan Sistem Pelayanan Berbasis IT Rendah
			Infrastruktur Pelayanan Publik Masih Kurang
			Masih Adanya sarana dan prasarana publik yang belum memadai
			Masih minimnya kepedulian masyarakat tentang kebersihan dan persampahan
			Masih sering terjadinya gengangan air/banjir
			Pemberdayaan ekonomi kerakyatan masih rendah
			Pembinaan Keagamaan, Sosial dan Kepemudaan serta ketentraman dan ketertiban umum belum maksimal

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran perangkat daerah merupakan proses, cara, dan hasil penerjemahan atas Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029, melalui Visi ***"Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tangerang Yang Sejahtera Dan Berdaya Saing"***. Adapun misi yang berkaitan dengan urusan pemerintahan (Kecamatan) adalah misi ke-1 ***"Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien"***.

Rumusan tujuan merupakan proses penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Kerja didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama bidang urusan di Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang.

Adapun rumusan tujuan di dalam Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2025 adalah : "**Mewujudkan Birokrasi yang Responsif, Akuntabel dan Inovatif".**

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Kecamatan dalam jangka satu tahun. Perumusan sasaran harus memiliki kriteria "SMART". Analisis SMART digunakan untuk menjabarkan isu yang telah dipilih menjadi sasaran yang lebih jelas dan tegas. Analisis ini juga memberikan pembobotan kriteria, yaitu khusus (*specific*), terukur (*measureable*), dapat dicapai (*attainable*), nyata (*realistic*) dan tepat waktu (*time bound*).

Sasaran di dalam Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang Tahun 2025 adalah "Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik."

Selain melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan, Camat juga melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Pemerintahan di atasnya untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan, kewenangan lain yang dilimpahkan. Pelimpahan sebagian wewenang ini dilakukan berdasarkan kriteria eksternalitas dan efisiensi. Eksternalitas yang dimaksud adalah kriteria pelimpahan urusan pemerintahan dengan memperhatikan dampak yang timbul sebagai akibat dari penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Apabila dampak yang ditimbulkan bersifat internal Kecamatan, maka urusan pemerintahan tersebut menjadi kewenangan Camat. Sedangkan yang dimaksud dengan efisiensi adalah kriteria pelimpahan urusan pemerintahan dengan memperhatikan daya guna tertinggi yang dapat diperoleh dari penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan dilingkup Kecamatan. Apabila urusan pemerintahan lebih berdayaguna ditangani oleh Kecamatan, maka urusan tersebut menjadi kewenangan Camat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 226 ayat 1 bahwa Camat mendapatkan sebagian kewenangan bupati/wali kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi

kewenangan Daerah kabupaten/kota. Berikut kutipan pelimpahan wewenagan Bupati Tangerang Kepada Camat di Kabupaten Tangerang untuk menanganni sebagian urusan daerah berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.

Tabel 3.1
Pelimpahan Kewenangan Bupati Kepada Camat

Urusan Daerah	Bidang Urusan	Rincian Urusan yang Dilimpahkan
1. Penetapan	Pengesahan, Pengalihan tugas, Izin cuti.	1. Penetapan pengesahan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berdasarkan laporan dan berita acara pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD); 2. Penetapan pengalihan tugas staf Kelurahan dalam 1 (satu) Kecamatan (diluar jabatan struktural dan fungsional); 3. Penetapan izin cuti pegawai; 4. Penetapan izin cuti Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan 5. Penetapan pelaksana tugas Kepala Desa.
2. Penyelenggaraan	Keciptakaryaan	1. Pemeliharaan pagar kantor milik Kecamatan dan Kelurahan; 2. Pemeliharaan gapura kantor milik Kecamatan dan Kelurahan; 3. Pemeliharaan taman dengan ukuran kurang dari 500m2 (lima ratus meter persegi); 4. Pemeliharaan paving blok jalan lingkungan penghubung antar Desa/Kelurahan; 5. Pemeliharaan ruang kantor milik Kecamatan dan Kelurahan; 6. Rehabilitasi ringan dan sedang aula kantor Kecamatan dan Kelurahan; 7. Penataan ruang kerja kantor Kecamatan dan Kelurahan; 8. Pemeliharaan dan rehabilitasi jalan lingkungan pada perumahan tertata yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah; 9. Pembuatan tempat pembuangan sampah sementara dan sarana kebersihan; 10. Pemeliharaan saluran pembuangan akhir (drainase dan air limbah) skala Kecamatan; 11. Pemeliharaan sarana penunjang kantor Kecamatan dan Kelurahan; 12. Pemeliharaan sarana air bersih dan sanitasi; 13. Pemeliharaan gelanggang olahraga dan stadion mini di Kecamatan; 14. Pemeliharaan gedung bersama

		keagamaan Kecamatan; 15. Bedah rumah perorangan bagi masyarakat berpenghasilan rendah khusus; dan 16. Perbaikan/rehabilitasi rumah perorangan bagi masyarakat miskin yang terkena bencana alam.
	Kebinamargaan dan Sumber Daya Air	1. Pemeliharaan badan jalan penghubung antar Desa/Kelurahan yang fungsinya lokal sekunder dan lingkungan; 2. Pemeliharaan jembatan perbatasan antar Desa/Kelurahan, dengan bentang jembatan paling tinggi 3 (tiga) meter; 3. Pemeliharaan drainase pada jalan penghubung antar Desa/Kelurahan yang fungsinya lokal sekunder dan lingkungan; 4. Pemeliharaan wilayah milik jalan pada jalan penghubung antar Desa/Kelurahan, meliputi pembersihan rumput/pengangkatan lumpur, yang fungsinya lokal sekunder dan lingkungan; 5. Pemeliharaan drainase pada lokasi jalan penghubung antar Desa/Kelurahan, meliputi pembersihan rumput/pengangkatan lumpur, yang fungsinya lokal sekunder dan lingkungan; 6. Pemeliharaan badan jembatan perbatasan antar Desa/Kelurahan dengan bentang paling tinggi 3 (tiga) meter serta bangunan pelengkap lainnya pada jalan Desa/Kelurahan yang fungsinya lokal sekunder dan lingkungan; 7. Pemeliharaan irigasi dan saluran tersier penghubung antar Desa/Kelurahan dengan lebar dan tinggi saluran paling tinggi 2 (dua) meter di luar saluran induk dan saluran sekunder; 8. Penyelenggaraan survey jalan penghubung antar Desa/Kelurahan yang fungsinya lokal sekunder dan lingkungan; 9. Monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan jalan/ jembatan/irigasi di wilayah Kecamatan; 10. Pembinaan/supervisi terhadap pelaksanaan manajemen pembangunan jalan/jembatan/irigasi kewenangan desa; 11. Pemeliharaanturap pada jalan penghubung antar Desa/Kelurahan yang fungsinya

		lokal sekunder dan lingkungan; dan 12. Pemeliharaan sarana dan prasarana pada perumahan tertata yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah.
	Kependudukan dan Catatan Sipil	1. Pendataan dan pelaporan data penduduk dan pendatang; 2. Pelaporan pembuatan kartu tanda penduduk dan kartu keluarga dari Desa/Kelurahan; 3. Pelaksanaan input data kartu tanda penduduk dan kartu keluarga; 4. Pengolahan data dan dan informasi kependudukan di Kecamatan; dan 5. Pembinaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil kepada Desa/Kelurahan.
	Operasional Pengangkutan Sampah	1. Pengelolaan sampah rumah tangga berbasis 3r (reduce, recycle, dan reduce) pada tingkat Kecamatan; 2. Pembentukan bank sampah pada tingkat Kecamatan; 3. Penyelenggaraan fasilitasi kegiatan biopori pada tingkat Kecamatan; 4. Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan tempat pengelolaan sampah terpadu pada tingkat Kecamatan; 5. Pengangkutan sampah dari tempat pembuangan sampah sementara sampai tiba pada tempat pembuangan akhir untuk wilayah perumahan/permukiman di luar kawasan tertata; 6. Pengangkutan sampah dari tempat pembuangan sampah sementara sampai tiba di tempat pembuangan sampah akhir untuk wilayah sekitar jalan Desa/Kelurahan; 7. Pengangkutan sampah dari tempat pembuangan sampah sementara sampai tiba di tempat pembuangan akhir jatiwaringin untuk wilayah perkantoran Kecamatan, Desa, dan Kelurahan; 8. Kerja bakti/gotong-royong pembersihan sampah pada tingkat Kecamatan; 9. Pemeliharaan taman kota pada Kecamatan secara swakelola; 10. Penyelenggaraan lomba kebersihan pada tingkat Kecamatan; 11. Pengelolaan kegiatan kurangi sampah di sekitar kantor (kurasakan) pada tingkat Kecamatan;

		12. Pengelolaan kegiatan kita peduli sampah (kiprah) pada tingkat Kecamatan; dan 13. Pengadaan sarana kebersihan, yang meliputi: a) kendaraan gerobak motor; b) gerobak sampah; c) tong sampah; d) mesin potong rumput; e) gergaji mesin pemotong rumput; mesin pompa; dan f) sarana kebersihan lainnya.
	Bidang Kesehatan	1. Penyelenggaraan Desa/Kelurahan siaga pada tingkat Kecamatan; 2. Penyelenggaraan Kabupaten Tangerang Sehat (KTS) tingkat Kecamatan; dan 3. Penyelenggaraan Gerakan Sayang Ibu (GSI) pada tingkat Kecamatan.
	Ketenagakerajaan	1. Penyelenggaraan padat karya; dan 2. Pelatihan keterampilan bagi masyarakat usia produktif.
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1. Penyelenggaraan perlombaan Desa/Kelurahan tingkat Kecamatan; 2. Penyelenggaraan program peningkatan wanita menuju keluarga sehat sejahtera pada tingkat Kecamatan; 3. Penyelenggaraan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pada tingkat Kecamatan; 4. Penyelenggaraan pelantikan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD); 5. Penyelenggaraan pelanjtikan Penjabat Lepala Desa; 6. Penyelenggaraan evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa; 7. Penyelenggaraan evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa; 8. Penyelenggaraan evaluasi laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa; dan 9. Penyelenggaraan evaluasi laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan Kepala Desa.
	Pembinaan dan Pengelolaan Generasi Muda, Olahraga, Seni Budaya dan Kegiatan Keagamaan di Kecamatan	1. Penyelenggaraan pembinaan dan pengelolaan generasi muda, yang meliputi: a) Paskibra; b) KNPI; c) Karang Taruna; dan d) Pramuka. 2. Penyelenggaraan pembinaan

		olahraga melalui penyelenggaraan kegiatan olahraga Kecamatan; 3. Penyelenggaraan pembinaan seni budaya dan pariwisata, yang meliputi: b) pentas seni budaya lokal; dan c) kelompok sadar wisata (pokdarwis). 4. Penyelenggaraan pembinaan keagamaan melalui penyelengaraan musabaqah tilawatil quran tingkat Kecamatan dan Kabupaten;
	Urusan Bencana Daerah	1. Pengadaan persediaan sembako; dan 2. Pengadaan sarana penanggulangan pra dan pasca banjir.
	Urusan Perpustakaan Daerah	1. Pembentukan perpustakaan daerah; 2. Pengadaan buku; 3. Pengadaan sarana perpustakaan; dan 4. Pengelolaan perpustakaan Kecamatan.
3. Pemungutan	Memungut Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB):	1. Rumah tinggal perorangan di pemukiman luar kawasan perumahan; 2. Penambahan/rehabilitasi rumah tinggal perorangan di pemukiman luar kawasan perumahan dan kawasan perumahan; dan/atau 3. Toko dan ruko satu pintu diluar kawasan tertata;

Selain tugas yang diperoleh dari pelimpahan sebagian wewenang Bupati atau Walikota untuk menangan sebagian urusan otonomi daerah, Camat juga menyelenggarakan tugas-tugas umum pemerintahan yang meliputi :

a. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
b. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
d. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
e. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan;
f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan, dan;
g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa/kelurahan.

3.2 Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2025 ini juga menjabarkan program dan

kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra setiap tahunnya dan sebagai bahan evaluasi dari capaian program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan di tahun yang lalu, sebagai panduan kinerja bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun berjalan dan perencanaan bagi program dan kegiatan yang akan datang.

Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang pada Tahun Anggaran 2025 melaksanakan 6 (Enam) Program Utama, 13 Kegiatan, dan 34 Sub Kegiatan yang tercantum dalam program kinerja nomenklaturnya mengacu pada nomenklatur yang terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Daerah, dan dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dibawah ini merupakan rekapitulasi program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta anggaran pada Kecamatan dan Kelurahan, yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan anggaran Rp10.320.870.459,00 terdiri dari kegiatan :
   a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
   b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
   c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
   d. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
   e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
   f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, dengan anggaran Rp13.043.055.000,00 terdiri dari kegiatan :
   a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan;
   b. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum.
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, dengan anggaran Rp2.185.481.080,00 terdiri dari kegiatan :
   a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa;
   b. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan.
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, dengan anggaran Rp172.717.000,00 terdiri dari kegiatan :
   a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, dengan anggaran Rp244.946.400,00 terdiri dari kegiatan :
   a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah;
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, dengan anggaran Rp128.967.000,00 terdiri dari kegiatan :
   a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

3.2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025

Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam Rencana Kerja Perubahan diperlukan strategi. Strategi adalah Langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan program kegiatan untuk mencapai tujuan, kebijakan juga dapat bersifat internal, yaitu kebijakan mengelola pelaksanaan program-program Pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan Masyarakat. Keterkaitan visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana ditampilkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.2
Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang Tahun 2025

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Target Capaian 2025
1	**Mewujudkan Birokrasi yang Responsif, Akuntabel, dan Inovatif**	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat	89.80

Adapun hubungan sasaran, indikator kinerja dengan program kegiatan, sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.3
Hubungan Sasaran, Indikator Kinerja dengan Program dan Kegiatan pada Kecamatan Sepatan

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PROGRAM	KEGIATAN
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat	89,80	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
					Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa;
					Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
				Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman

					dan Ketertiban Umum
				Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
				Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
					Administrasi Umum Perangkat Daerah
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

3.3 Pendanaan Program dan Kegiatan Kecamatan Sepatan Tahun 2025

Tabel 3.4

Rencana Kerja Perubahan Tahun Anggaran 2025 dan Pendanaan Perangkat Daerah

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan				
						APBD 2025		APBD 2025 (Perubahan)		Selisih
						Target	Rp.	Target	Rp.	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Mewujudkan Birokrasi yang Responsif, Akuntabel, dan Inovatif	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik	**7**	**UNSUR KEWILAYAHAN**							
		7.01	**UNIT KECAMATAN**				**16.424.775.346,00**		**26.096.036.939,00**	**9.671.261.593,00**
		7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan**	**Persen**	**100%**	**9.832.712.566,00**	**100%**	**10.320.870.459,00**	**488.157.893,00**
		7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun**	**Dokumen**	**11**	**113.562.000,00**	**11**	**105.456.600,00**	**-8.105.400,00**
		7.01.01.2.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6	42.872.400,00	6	51.382.800,00	8.510.400,00
		7.01.01.2.01.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	4	45.848.000,00	4	40.985.000,00	-4.863.000,00
		7.01.01.2.01.007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	2	24.841.600,00	2	13.088.800,00	-11.752.800,00
		7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah laporan keuangan**	**Dokumen**	**2**	**6.879.459.446,00**	**2**	**6.928.049.756,00**	**48.590.310,00**
		7.01.01.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	35	6.831.495.346,00	35	6.892.679.356,00	61.184.010,00
		7.01.01.2.02.007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	2	47.964.100,00	2	35.370.400,00	-12.593.700,00
		7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah laporan pembinaan pegawai**	**Dokumen**	**2**	**87.618.000,00**	**2**	**75.777.600,00**	**-11.840.400,00**
		7.01.01.2.05.002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	22	73.278.000,00	22	25.815.000,00	-47.463.000,00
		7.01.01.2.05.011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	50	14.340.000,00	50	49.962.600,00	35.622.600,00

		7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah**	**Jenis**	**8**	**585.348.400,00**	**8**	**801.896.700,00**	**216.548.300,00**
		7.01.01.2.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	8.263.000,00	4	8.561.000,00	298.000,00
		7.01.01.2.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	9	184.614.000,00	9	360.086.000,00	175.472.000,00
		7.01.01.2.06.003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	10	15.848.700,00	10	14.771.000,00	-1.077.700,00
		7.01.01.2.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	24	29.293.300,00	24	28.094.300,00	-1.199.000,00
		7.01.01.2.06.005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	27.159.000,00	4	21.591.000,00	-5.568.000,00
		7.01.01.2.06.006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	5	27.030.000,00	5	87.030.000,00	60.000.000,00
		7.01.01.2.06.008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	24	64.080.000,00	24	43.020.000,00	-21.060.000,00
		7.01.01.2.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	2	54.504.000,00	2	35.314.000,00	-19.190.000,00
		7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah laporan jasa penunjang**	**Dokumen**	**23**	**1.473.373.295,00**	**23**	**1.574.222.608,00**	**100.849.313,00**
		7.01.01.2.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	2	206.251.095,00	2	208.858.840,00	2.607.745,00
		7.01.01.2.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	15	906.594.000,00	15	1.000.887.568,00	94.293.568,00
		7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah\laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Unit**	**7**	**693.351.425,00**	**7**	**835.467.195,00**	**142.115.770,00**
		7.01.01.2.09.001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	6	166.344.800,00	6	74.199.984,00	-92.144.816,00
		7.01.01.2.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	40.629.000,00	1	191.204.136,00	150.575.136,00
		7.01.01.2.09.006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	4	33.150.000,00	4	31.950.000,00	-1.200.000,00
		7.01.01.2.09.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4	453.227.625,00	4	538.113.075,00	84.885.450,00

		7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara**	**Persen**	**91.35% 93%**	**3.849.085.000,00**	**91.35% 93%**	**13.043.055.000,00**	**9.193.970.000,00**
		7.01.02. 2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Jumlah laporan pelayanan**	**Dokumen**	**2**	**475.970.000,00**	**2**	**525.385.000,00**	**49.415.000,00**
		7.01.02. 2.02.003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	lapora n	2	163.350.000,00	2	130.424.000,00	-32.926.000,00
		7.01.02. 2.03	**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**	**Jumlah dokumen pemeliharaan**	**Dokumen**	**40**	**3.373.115.000,00**	**40**	**12.517.670.000,00**	**9.144.555.000,00**
		7.01.02. 2.03.001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Dokumen	40	3.373.115.000,00	40	12.517.670.000,00	9.144.555.000,00
		7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan**	**Persen**	**85%**	**2.009.395.980,00**	**85%**	**2.185.481.080,00**	**176.085.100,00**
		7.01.03. 2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Jumlah laporan pemberdayaan**	**Dokumen**	**2**	**1.165.186.580,00**	**2**	**1.410.696.680,00**	**245.510.100,00**
		7.01.03. 2.01.001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga Kemasyarakatan	10	65.226.800,00	10	63.780.600,00	-1.446.200,00
		7.01.03. 2.01.003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	10	1.099.959.780,00	10	1.346.916.080,00	246.956.300,00
		7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti**	**Persen**	**100%**	**258.762.000,00**	**100%**	**172.717.000,00**	**-86.045.000,00**
		7.01.04. 2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Jumlah laporan gangguan trantibum**	**Dokumen**	**5**	**258.762.000,00**	**5**	**172.717.000,00**	**-86.045.000,00**
		7.01.04. 2.01.001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	5	157.396.000,00	5	114.413.000,00	-42.983.000,00

		7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti**	**Persen**	**60%**	**291.727.800,00**	**60%**	**244.946.400,00**	**-46.781.400,00**
		7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Jumlah rekomendasi yang dikeluarkan**	**Dokumen**	**2**	**291.727.800,00**	**2**	**244.946.400,00**	**-46.781.400,00**
		7.01.05.2.01.001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang	50	234.647.400,00	50	197.401.000,00	-37.246.400,00
		7.01.05.2.01.008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	3	57.080.400,00	3	47.545.400,00	-9.535.000,00
		7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase tertib administrasi pemerintahan desa**	**Persen**	**90%**	**183.092.000,00**	**90%**	**128.967.000,00**	**-54.125.000,00**
		7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**	**Dokumen**	**7**	**183.092.000,00**	**7**	**128.967.000,00**	**-54.125.000,00**
		7.01.06.2.01.002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	7	152.652.000,00	7	103.713.000,00	-48.939.000,00
		7.01.06.2.01.007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Dokumen	7	8.785.000,00	7	7.670.000,00	-1.115.000,00
		7.01.06.2.01.009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	7	21.655.000,00	7	17.584.000,00	-4.071.000,00
		7.01	**SUB UNIT KELURAHAN**							
	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan**	**Persen**	**100%**	**9.832.712.566,00**	**100%**	**10.320.870.459,00**	**9.671.261.593,00**
		7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah**	**Jenis**	**8**	**585.348.400,00**	**8**	**801.896.700,00**	**216.548.300,00**

	Pelayanan Publik	7.01.01.2.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	9	117.482.700,00	9	135.167.700,00	17.685.000,00
		7.01.01.2.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	10	41.173.700,00	10	51.461.700,00	10.288.000,00
		7.01.01.2.06.006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	2	9.900.000,00	2	9.900.000,00	0,00
		7.01.01.2.06.008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	6.000.000,00	1	6.900.000,00	900.000,00
		7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah laporan jasa penunjang**	**Dokumen**	**2**	**1.473.373.295,00**	**2**	**1.574.222.608,00**	**100.849.313,00**
		7.01.01.2.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	2	67.422.200,00	2	60.732.200,00	-6.690.000,00
		7.01.01.2.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	2	293.106.000,00	2	303.744.000,00	10.638.000,00
	Meningkatnya pelayanan publik sesuai dengan standar Kecamatan	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara**	**Persen**	**91.35 % 93%**	**3.849.085.000,00**	**91.35 % 93%**	**13.043.055.000,00**	**9.193.970.000,00**
		7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Jumlah laporan pelayanan**	**Dokumen**	**2**	**475.970.000,00**	**2**	**525.385.000,00**	**49.415.000,00**
		7.01.02.2.02.003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	2	312.620.000,00	2	394.961.000,00	82.341.000,00
		7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan**	**Persen**	**85%**	**2.009.395.980,00**	**85%**	**2.185.481.080,00**	**176.085.100,00**
		7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Jumlah laporan pemberdayaan**	**Dokumen**	**3**	**844.209.400,00**	**3**	**774.784.400,00**	**-69.425.000,00**
		7.01.03.2.02.001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga Kemasyarakatan	4	19.335.200,00	4	19.155.200,00	-180.000,00
		7.01.03.2.02.002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	9	568.869.200,00	9	533.940.200,00	-34.929.000,00
		7.01.03.2.02.003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas/Ormas	6	256.005.000,00	6	221.689.000,00	-34.316.000,00
		7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti**	**Persen**	**100%**	**258.762.000,00**	**100%**	**172.717.000,00**	**-86.045.000,00**
		7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan**	**Jumlah laporan gangguan trantibum**	**Dokumen**	**4**	**258.762.000,00**	**4**	**172.717.000,00**	**-86.045.000,00**

			Ketenteraman dan Ketertiban Umum							
		7.01.04.2.01.001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	4	101.366.000,00	4	58.304.000,00	-43.062.000,00
JUMLAH TOTAL							**16.424.775.346,00**		**26.096.036.939,00**	**9.671.261.593,00**

Berdasarkan tabel diatas untuk Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025 Kecamatan Sepatan mendapatkan anggaran tambahan sebesar Rp9.671.261.593,00 (Sembilan Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Dua Ratus Enam Puluh Satu Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah), dimana sub kegiatan yang mendapatkan anggaran tambahan sebagai berikut :

1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
3. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
4. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
5. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
6. Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum;
7. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan; dan
8. Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB IV
PENUTUP

Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Perubahan Kecamatan Sepatan Tahun 2025 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun dengan menjabarkan dokumen Renstra Kecamatan Sepatan Tahun 2025-2029, dengan mempedomani RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029. Selain itu Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2025 merupakan pedoman rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan orientasi pada hasil yang ingin dicapai selama Tahun 2025.

Sebagai pedoman kerja, pelaksanaan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2025 ditetapkan dengan kaidah-kaidah sebagai berikut :

1. Seluruh aparatur Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang wajib melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Rencana Kerja Perubahan Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Anggaran pelaksanaan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang Tahun 2025 akan dijabarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun 2025;
3. Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun 2025 akan dimonitoring setiap bulan dan dilaporkan kepada Camat Sepatan setiap 3 (tiga) bulan. Pada akhir tahun pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang Tahun 2025 akan dievaluasi sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja ditahun yang akan datang.

Rencana Tindak Lanjut dalam pelaksanaan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2025 senantiasa akan dilakukan pengawasan dan evaluasi sebagai wujud penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan dan bercirikan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Dalam pelaksanaan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2025 dimungkinkan terjadi perkembangan dan dinamika pembangunan yang harus diakomodir. Sebagai konsekuensinya, diperlukan langkah-langkah penyesuaian yang harus diwujudkan terhadap Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2025.

44. Kecamatan Teluknaga

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, proses penyusunan Renja OPD terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan renja Perubahan OPD. Penyusunan Renja Perubahan OPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja Perubahan OPD yang definitif.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Renja Perubahan Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang merupakan dokumen perencanaan Kecamatan Teluknaga untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan RKPD Kabupaten Tangerang serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026.

Dalam melaksanakan kewenangan dengan memperhatikan keterkaitan antara Perencanaan Daerah dengan Perencanaan Kecamatan, maka perencanaan tujuan Kecamatan mendukung Perencanaan Permbangunan Daerah, sehingga tujuan maupun sasaran pembangunan yang ingin dicapai Pemerintah Kecamatan bersinergi dengan tujuan maupun sasaran yang ingin dicapai oleh Pemerintah Daerah. Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Tahun 2025 Kecamatan Teluknaga memuat usulan program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Teluknaga serta kerangka pendanaan daerah, Renja Perubahan Kecamatan Teluknaga secara subastansial sesuai dengan Visi, Misi, agenda dan rencana resmi daerah (RKPD, RPJMD dan Renstra) dengan Renja K / L dan Renja Provinsi / Kabupaten serta tindak lanjutnya dengan proses Penyusunan RAPBD, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Perencanaan Pembangunan harus mencakup 5 (lima) pendekatan yaitu :

1. Pendekatan politis, dimana dengan adanya pemilihan Kepala Daerah secara langsung, maka program-program yang ditawarkan oleh kadindat Kepala Daerah pada saat melakukan melakukan kampanye harus dianggap sebagai proses perencanaan pembangunan;
2. Pendekatan teknokratik dimana perencanaan pembangunan harus menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah;
3. Pendekatan partisipatif yang masyarakat bahwa proses penyusunan perencanaan pembangunan harus melibatkan masyarakat sebagai pihak yang berkepentingan (Stakeholder) terhadap pembangunan;
4. Pendekatan Top Down yaitu bahwa penyusunan perencanaan pembangunan harus memperhatikan program–program jenjang pemerintah diatasnya;
5. Pendekatan Botom Up yaitu penyusunan perencanaan pembangunan harus memperhatikan kepentingan dan

kebutuhan Stakeholder atau jenjang pemerintah dibawahnya, hasil proses penyusunan rencana pembangunan, diselaraskan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang.

Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Teluknaga Tahun 2025 disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, mengacu kepada Rancangan RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2025, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya. Selanjutnya Renja Perubahan dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan dan kemudian berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan melalui penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang Tahun 2025 adalah :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023;
11. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 31 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang;
12. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 33 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasngerang.

13. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 16 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2025

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang Tahun 2025 ini disusun untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan maupun pelayanan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.
2. Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang Tahun 2025 adalah :
   a. Menyediakan dokumen perencanaan tahunan Kecamatan Teluknaga Tahun 2025;
   b. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2025;
   c. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sebagaimana telah dirumuskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Rencana Kerja Perubahan Tahun Anggaran 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN OPD
- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan pencapaian kinerja Renstra Perangkat Daerah ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi capaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Perangkat Daerah, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Jenis program dan kegiatan yang direncanakan di dalam Renja Perubahan Kecamatan Teluknaga berdasarkan Renstra Kecamatan Teluknaga Tahun 2024-2026 yang terdiri dari 6 (enam) Program, dan 13 (tiga belas) Kegiatan. Review didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun – tahun sebelumnya, laporan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah, dan Perkiraan pelaksanaan DPA - Perangkat Daerah tahun berjalan yang baru disahkan.

Fungsi evaluasi ini adalah dalam rangka penyediaan informasi yang berguna untuk menentukan strategi dan kegiatan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Teluknaga Tahun Anggaran 2025. Evaluasi atau reviu dilakukan terhadap realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Teluknaga Tahun 2025.

Keberhasilan pencapaian Visi dan Misi akan sangat dipengaruhi oleh tingkat kualitas sumber daya manusia. Karena manusia sebagai subyek pelaku pembangunan yang sangat berperan dan menentukan baik sebagai perencana, pelaksana, pengguna maupun sebagai evaluator dari hasil kegiatan pembangunan. Dengan demikian tingginya tingkat kualitas sumber daya manusia para pelaku pembangunan (masyarakat, pemerintah maupun dunia usaha) sangat diperlukan dalam upaya mencapai tujuan pembangunan. Sesuai dengan tuntutan persaingan dan perkembangan dunia di era globalisasi dimana informasi terus berkembang peningkatan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Tangerang khususnya perlu diarahkan pada upaya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang diharapkan akan mampu tumbuh, berdaya tahan dan mampu bersaing serta tumbuhnya jiwa kewirausahaan. Disisi lain evaluasi hasil perencanaan sampai dengan triwulan II akan menambah basis data untuk merencanakan program dan kegiatan selanjutnya..

Secara umum Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Teluknaga Tahun 2025 memuat rencana program dan kegiatan dengan tetap memperhatikan potensi yang ada dalam rangka ***"Mewujudkan Masyarakat Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang yang Religius, Cerdas, Sehat dan Sejahtera".*** Keberhasilan suatu proses perencanaan akan bisa dilihat dari hasil evaluasi pelaksanaan sampai dengan Triwulan II, sejauh mana pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan berdampak terhadap capian yang telah ditetapkan di dalam Renstra SKPD, hasil dari evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan – kebijakan perencanaan pembangunan di tahun – tahun mendatang. Pada tahun anggaran 2025

Kecamatan Teluknaga telah melaksanakan kegiatan yang menunjang tugas, pokok dan fungsinya telah menyelesaikan beberapa proses perencanaan pembangunan, yaitu:

1. Menyusun dokumen perencanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2026, mulai dari proses musrenbang tingkat desa, musrenbang tingkat kecamatan, forum SKPD dan Musrenbang Tingkat Kabupaten.
2. Menyusun Rencana Kerja SKPD, Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025, pelaksanaan kinerja Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang ditunjang dengan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung yang terdiri dari Belanja Langsung Urusan SKPD dan Belanja Langsung Urusan Wajib dan Pilihan (Program), dengan ruang lingkup kegiatannya.

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan II

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d Triwulan II		
			Target Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Tingkat Realisasi
1	2	3	6	7	8
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan**	**100%**	**50%**	**50%**
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun**	**3**	**2**	**67%**
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	1	**50%**
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	1	**50%**
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	1	**50%**
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah laporan keuangan**	**2**	**1**	**50%**
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	38	24	**63%**
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKP	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2	1	**50%**
7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Pembinaan Pegawai**	**2**	**1**	**50%**
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	1	**100%**
7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50	50	**100%**
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**8**	**4**	**50%**

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d Triwulan II		
			Target Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Tingkat Realisasi
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1	**100%**
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	1	**100%**
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	1	**100%**
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1	1	**100%**
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	1	**100%**
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undanga	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2	1	**50%**
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2	1	**50%**
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2	1	**50%**
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Laporan Jasa Penunjang**	**3**	**2**	**67%**
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	1	**100%**
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	1	**100%**
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	1	**100%**
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah\ Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**4**	**2**	**50%**
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5	3	**60%**

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d Triwulan II		
			Target Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Tingkat Realisasi
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10	8	**80%**
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15	10	**67%**
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	3	**75%**
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar**	**100%**	**50%**	**50%**
		Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara	**100%**	**50%**	**50%**
7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Jumlah laporan pelayanan**	**2**	**1**	**50%**
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2	1	**50%**
7.01.02.2.03	**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**	**jumlah dokumen pemeliharaan**	**2**	**1**	**50%**
7.01.02.2.03.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	2	1	**50%**
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan**	**100%**	**50%**	**50%**
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Jumlah Laporan Pemberdayaan**	**2**	**1**	**50%**
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	13	13	**100%**
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2	1	**50%**
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti**	**100%**	**50%**	**50%**

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d Triwulan II		
			Target Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Tingkat Realisasi
7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**jumlah laporan gangguan trantibum**	**2**	**1**	**50%**
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2	1	**50%**
7.01.07	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti**	**100%**	**50**	**50%**
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**jumlah rekomendasi yang dikeluarkan**	**2**	**1**	**50%**
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	50	30	60%
7.01.05.2.01.04	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	2	1	50%
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase tertib administrasi pemerintahan desa**	**100%**	**50**	**50%**
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**	**6**	**3**	**50%**
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	2	1	**50%**
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	2	1	**50%**
7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	2	1	**50%**
7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	2	1	**50%**

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d Triwulan II		
			Target Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Tingkat Realisasi
7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan PembangunanDesa	2	1	**50%**
7.01.06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	2	1	**50%**

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dilakukan melalui : Penetapan Indikator Kinerja yaitu ukuran kuantitaf dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impact). Indikator – indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

Selanjutnya dilakukan Analisis Capaian Kinerja atas sasaran yang didasarkan atas hasil pengukuran kinerja kegiatan dalam suatu sasaran dilakukan analisis pencapaian kinerja atas sasaran tersebut. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja utama. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Kecamatan Teluknaga sebagai sebagai salah satu Perangkat Daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya tidak saja berurusan dengan aspek pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan administrasi Pemerintah Kecamatan semata melainkan juga merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat di tingkat Kecamatan. Oleh karenanya capaian kinerja pelayanannya lebih banyak dianalisis dari sudut pandang tugas pokok dan fungsi Kecamatan dan juga indikator kinerja output yang dihasilkan dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam rangka penyelnggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Teluknaga telah ditentukan isu – isu penting yaitu sebagai berikut :

1. Peningkatan profesionalisme kinerja aparatur pelayanan Kecamatan Teluknaga dalam dalam memberikan pelayanan berkualitas kepada masyarakat sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi di Kecamatan Teluknaga.
    a. Terbatasnya jumlah personil di Kecamatan Teluknaga sehingga menghambat penyelenggaraan tugas dan fungsi secara optimal;
    b. Terbatasnya sarana dan prasarana sehingga dalam melaksanakan tugas pelayanan belum maksimal;
    c. Belum terakomodirnya seluruh usulan-usulan pembangunan di wilayah Kecamatan Teluknaga dalam APBD Kabupaten Tangerang;
    d. Pembangunan Infrastruktur di Kecamatan Teluknaga sudah cukup baik, namun hal ini perlu ditingkatkan kualitas maupun kuantitasnya, khususnya untuk peningkatan jalan Kabupaten dan pembangunan jalan desa yang sudah secara bertahap dilakukan pembangunan melalui berbagai program pembangunan;
3. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan, adalah:
    a. Urusan Administrasi Pemerintahan

Dalam Perencanaan Pembangunan pada tahun anggaran 2025 telah dilaksanakan melalui Musrenbang, tetapi realisasinya jauh dari rencana yang diusulkan, dikarenakan ada beberapa program yang tidak sesuai dengan program RPJMD sehingga diperlukan rasionalisasi dan sinkronisasi lebih lanjut.

Urusan Administrasi Pemerintahan mengakomodir kegiatan-kegiatan yang berada pada :

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
4) Program Peningkatan Perencanaan SKPD, dan
5) Program Administrasi Pemerintahan dan Pelayanan Umum di Kecamatan.

b. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kecamatan Teluknaga senantiasa berusaha optimal dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur dasar kebutuhan masyarakat, baik melalui pagu indikatif Kecamatan maupun pagu dana aspirasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mengakomodir kegiatan-kegiatan yang berada pada :

1) Program Penataan Lingkungan Permukiman Perdesaan dan Perkotaan, dan
2) Program Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana di Kecamatan.

c. Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Ketentraman dan Ketertiban Umum merupakan kebutuhan dasar kehidupan keseharian masyarakat sehingga perlu dijaga secara berkesinambungan dengan meningkatkan peran serta masyarakat didalamnya.

Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat mengakomodir kegiatan-kegiatan yang berada pada :

- Program Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ketertiban dan Ketentraman Umum, dan
- Program Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan.

d. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Dinamika pembangunan menuntut adanya peningkatan kualitas sumberdaya manusia agar tidak tergerus oleh perkembangan jaman. Peningkatan kapasitas masyarakat dilaksanakan melalui berbagai kegiatan pembinaan dan pendampingan kelompok-kelompok masyarakat agar bisa lebih produktif.

Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa mengakomodir kegiatan-kegiatan yang berada pada Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi di Kecamatan.

e. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Kecamatan Teluknaga berupaya secaya optimal untuk terus melakukan pembinaan-pembinaan terhadap organisasi kepemudaan terutama bagi Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra).

Urusan Kepemudaan dan Olahraga mengakomodir kegiatan-kegiatan yang berada pada Program Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Potensi Kepemimpinan, Kewirausahaan serta Kepeloporan Pemuda.

Struktur organisasi Kecamatan Teluknaga berdasarkan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 113 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas, dan Fungsi serta tata kerja kecamatan dan kelurahan di lingkungan pemerintah Kecamatan Teluknaga terdiri dari Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris Daerah. Kecamatan merupakan perangkat daerah dengan Kecamatan Tipe A.

Camat dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh perangkat kecamatan. Perangkat kecamatan terdiri dari:

1. Sekretariat;
2. Seksi; dan
3. Kelurahan.

Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari:

1. Camat;
2. Sekretariat Kecamatan, terdiri atas:
   a. Subbagian Umum dan Kepegawian; dan
   b. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
3. Seksi Pemerintahan;
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
5. Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat;
6. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa;
7. Seksi Pelayanan;
8. Kelurahan; dan
9. Kelompok Jabatan Fungsional.

A. Camat;

Kecamatan di pimpin oleh Camat yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati Tangerang melalui Sekretaris Daerah. Dalam menjalankan tugas dan fungsi tersebut Camat dibantu oleh 1 (satu) Sekretaris Kecamatan dan 5 (lima) Kepala Seksi dengan tugas dan fungsi sebagai berikut :

Camat mempunyai tugas :

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
2. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
5. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;

7. Membina dan mengawasai penyelenggaraan kegiatan Desa dan Kelurahan;
8. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan; dan; dan
9. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaan tugas , Camat mempunyai fungsi :

1. Penyiapan rumusan kebijakan teknis pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan, penyelenggaraan kegiatan Desa dan Kelurahan, dan pelayanan publik yang menjadi ruang lingkup tugasnya di Kecamatan;
2. Penyiapan rencana dan program kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan, penyelenggaraan kegiatan Desa dan Kelurahan, dan pelayanan publik yang menjadi ruang lingkup tugasnya di Kecamatan;
3. Penyiapan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan, penyelenggaraan kegiatan Desa dan Kelurahan, dan pelayanan publik yang menjadi ruang lingkup tugasnya di Kecamatan;
4. Penyiapan pengawasan dan pengendalian kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan, penyelenggaraan kegiatan Desa dan Kelurahan, dan pelayanan publik yang menjadi ruang lingkup tugasnya di Kecamatan;
5. Penyiapan bimbingan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan, penyelenggaraan kegiatan Desa dan Kelurahan, dan

pelayanan publik yang menjadi ruang lingkup tugasnya di Kecamatan;

6. Pengelolaan administrasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan, penyelenggaraan kegiatan Desa dan Kelurahan, dan pelayanan publik yang menjadi ruang lingkup tugasnya di Kecamatan;

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) camat mempunyai rincian tugas:

a. Merencanakan perumusan kebijakan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan, penyelenggaraan kegiatan Desa dan Kelurahan, dan pelayanan publik yang menjadi ruang lingkup tugasnya di Kecamatan;
b. Membagi tugas program pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan, penyelenggaraan kegiatan Desa dan Kelurahan, dan pelayanan publik yang menjadi ruang lingkup tugasnya di Kecamatan;
c. Memberi petunjuk program pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan, penyelenggaraan kegiatan Desa dan Kelurahan, dan pelayanan publik yang menjadi ruang lingkup tugasnya di Kecamatan;
d. Mengatur program pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan, penyelenggaraan kegiatan Desa dan Kelurahan, dan pelayanan publik yang menjadi ruang lingkup tugasnya di Kecamatan;

e. Mengevaluasi kegiatan program pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan, penyelenggaraan kegiatan Desa dan Kelurahan, dan pelayanan publik yang menjadi ruang lingkup tugasnya di Kecamatan;
f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Camat mendapatkan pelimpahan/pendelegasian sebagian kewenangan Bupati untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas pelimpahan/pendelegasian sebagian kewenangan Bupati sebagaimana dimaksud diatur dengan Peraturan Bupati.

B. Sekretariat, membawahi :
   1. Sub. Bagian Perencanaan dan Keuangan
   2. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian

Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada camat. Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pembinaan daan pengendalian kegiatan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan program kerja, keuangan, serta pengkoordinasian tugas satuan organisasi di lingkungan kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Kecamatan mempunyai fungsi:

1. Penyiapan rumusan kebijakan teknis pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, Perencanaan dan Keuangan, pengelolaan perencanaan program kerja kecamatan, evaluasi dan pelaporan;
2. Penyiapan rencana dan program pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, Perencanaan dan Keuangan, perencanaan program kerja kecamatan, evaluasi dan pelaporan;
3. Penyiapan pengendalian pelaksanan urusan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, Perencanaan dan keuangan, perencanaan program kerja kecamatan, evaluasi dan pelaporan;
4. Penyiapan bimbingan pelaksanaan urusan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, Perencanaan dan keuangan, perencanaan program kerja kecamatan, evaluasi dan pelaporan;
5. Pengelolaan administrasi urusan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, Perencanaan dan Keuangan, perencanaan program kerja kecamatan, evaluasi dan pelaporan;

Dalam melaksanakan fungsi, Sekretaris Kecamatan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

1. Merencanakan perumusan kebijakan penyusunan Rencana Srategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan serta perumusan bahan kebijakan program yang terkait dengan umum dan kepegawaian serta perencanaan dan keuangan ;
2. Membagi tugas program yang terkait dengan umum dan kepegawaian serta perencanaan dan keuangan;
3. Memberi petunjuk program yang terkait dengan umum dan kepegawian, serta perencanaan dan keuangan;
4. Memberi petunjuk program;
5. Mengatur program setiap satuan organisasi (kepala seksi dan lurah) di lingkungan kecamatan dalam perencanaan program, pelaksanaan kegiatan, evalusi dan pelaporan, umum dan kepegawaian serta perencanaan dan keuangan;
6. Mengatur program yang terkait dengan umum dan kepegawaian meliputi mengevaluasi kebutuhan pegawai, perlengkapan, prasarana dan sarana di kecamatan, mengatur jumlah seluruh pelaksana kecamatan untuk ditempatkan pada setiap unit kerja sesuai kebutuhan dan keahlian,
7. Mengatur program yang terkait dengan umum dan kepegawaian meliputi memelihara, mendayagunakan serta mendistribusikan prasarana dan sarana di lingkungan kecamatan agar efektif, mengatur administrasi umum dan kepegawaian kecamatan serta aset daerah di lingkungan tugasnya, mengatur surat menyurat, kearsipan, perjalanan dinas dan perlengkapan, urusan rumah tangga dan informasi kehumasan
8. Mengatur program yang terkait dengan perencaan dan keuangan yang meliputi : menyelenggarakan administrasi keuangan dan penatausahaan keuangan kecamatan di lingkungan tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
9. Mengevaluasi kegiatan program satuan organisasi (kepala seksi dan lurah) di lingkungan kecamatan dalam perencanaan program, pelaksanaan kegiatan, evalusi dan pelaporan, umum dan kepegawaian serta perencanaan dan keuangan dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
10. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsi

a. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub bagian umum dan kepegawian sebagaimana dipimpin oleh kepala subbagian umum dan kepegawaian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada sekretaris kecamatan. Subbagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas melakukan kegiatan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, kerumahtanggaan, dan kehumasan di lingkungan kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas, subbagian umum dan kepegawian mempunyai rincian tugas:

1) Merencanakan kegiatan umum dan kepegawaian program kerja operasional pelayanan administrasi umum,

kepegawaian, perlengkapan, kerumahtanggaan, dan informasi kehumasan di kecamatan;

2) membimbing pelaksanaan kegiatan umum yang meliputi : surat menyurat, penggandaan, pengiriman, pengarsipan, tata naskah dinas, Inventarisasi Aset dan Persediaan Pengadaan barang dan jasa, Pendistribusian, Stock Opname, fasilitasi pengelola informasi dan dokumen (PID), perjalanan dinas dan pemeliharaan barang-barang Inventaris;
3) membimbing pelaksanaan kegiatan kepegawaian meliputi : layanan administrasi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala (KGB), Daftar Urut Kepangkatan (DUK), data pegawai, Katu Pegawai (karpeg), Karis/Karsu, tunjangan anak/keluarga dan jabatan, asuransi kesehatan, tabungan pensiun, tabungan perumahan, pensiun, usulan formasi pegawai, usulan izin belajar, usulan diklat pegawai, usulan pemberian penghargaan dan tanda kehormatan, penilaian angka kredit jabatan fungsional, teguran disiplin pegawai, usulan cuti pegawai, usulan perpindahan/cuti pegawai, pengelolaan standar kompetensi pegawai (SKP).
4) Membimbing pelaksanaan kegiatan umum dan kepegawaian yang meliputi : pembinaan dan pengembangan pegawai kecamatan, pembinaan dan supervisi pengelolaan dan pendayagunaan aset daerah yang dikelola oleh kelurahan, urusan rumah tangga dan informasi kehumasan di kecamatan
5) Membagi tugas pelaksanaan kegiatan umum meliputi : surat menyurat, penggandaan, pengiriman, pengarsipan, tata naskah dinas, Inventarisasi Aset dan Persediaan Pengadaan barang dan jasa, Pendistribusian, Stock Opname, fasilitasi pengelola informasi dan dokumen (PID), perjalanan dinas dan pemeliharaan barang-barang Inventaris;
6) membagi tugas pelaksanaan pelayanan administrasi kepegawian di lingkup kecamatan yang meliputi layanan administrasi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala (KGB), Daftar Urut Kepangkatan (DUK), data pegawai, Kartu Pegawai (karpeg), Karis/Karsu, tunjangan anak/keluarga dan jabatan, asuransi kesehatan, tabungan pensiun, tabungan perumahan, pensiun, usulan formasi pegawai, usulan izin belajar, usulan diklat pegawai, usulan pemberian penghargaan dan tanda kehormatan, penilaian angka kredit jabatan fungsional, teguran disiplin pegawai, usulan cuti pegawai, usulan perpindahan/cuti pegawai, pengelolaan standar kompetensi pegawai (SKP);
7) mengevaluasi pelaksanaan kegiatan umum dan kepegawaian dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya;
8) membuat laporan pelaksanaan kegiatan umum dan kepegawaian yang meliputi : laporan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang, administrasi aset daerah di lingkup kecamatan, penilaian prestasi kerja pegawai kecamatan

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

9) melaksanakan tugas kedinasan lain yang dierikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Subbagian perencanaan dan keuangan dipimpin oleh kepala subbagian perencanaan dan keuangan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada sekretaris kecamatan. Subbagian perencanaan dan keuangan mempunyai tugas melakukan kegiatan penyusunan rencana dan program kerja kecamatan, serta pengelolaan administrasi dan pengelolaan keuangan kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas, kepala subbagian perencanaan dan keuangan mempunyai rincian tugas:

1) merencanakan kegiatan Perencanaan dan keuangan;
2) membimbing pelaksanaan kegiatan perencanaan yang meliputi : RPJMD, Rencana Strategis, Rencana Kerja, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja, Penyusunan Dokumen RKA/DPA, RRKA/DPPA, Forum SKPD, Monitoring dan Evaluasi, pelaksanaan pengembangan e-goverment, serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. melakukan pengoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan kecamatan meliputi Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), dan Penetapan Kinerja (PK);
3) membimbing pelaksanaan kegiatan administrasi keuangan yang meliputi : Pengajuan Surat Membayar Uang Persediaan, Ganti Uang, Tambahan Uang, LS Bendahara, LS Pihak Ketiga dan Ganti Uang Nihil, Pencairan, Pencatatan, Pembukuan, serta Pelaporan Pertanggungjawaban Anggaran;
4) membagi tugas pelaksanaan kegiatan administrasi perencanaan yang meliputi : RPJMD, Rencana Strategis, Rencana Kerja, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja, Penyusunan Dokumen RKA/DPA, RRKA/DPPA, Fasilitasi Perencanaan SKPD, Monitoring dan Evaluasi, e-Reporting, Reviu Penyerapan Anggaran, Data Pembangunan SKPD serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5) membagi tugas pelaksanaan kegiatan administrasi keuangan yang meliputi : Pengajuan Surat Membayar Uang Persediaan, Ganti Uang, Tambahan Uang, LS Bendahara, LS Pihak Ketiga dan Ganti Uang Nihil, Pencairan, Pencatatan, Pembukuan, serta Pelaporan Pertanggungjawaban Anggaran;
6) mengevaluasi pelaksanaa kegiatan yang terkait dengan perencanaan dan keuangan dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya;
7) membuat laporan pelaksanaan kegiatan perencanaan dan keuangan yang meliputi : Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan

Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK), dan RPJMD, Rencana Strategis, Rencana Kerja, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja, Penyusunan Dokumen RKA/DPA, RRKA/DPPA, Fasilitasi Perencanaan SKPD, Monitoring dan Evaluasi, e-Reporting, Reviu Penyerapan Anggaran, Data Pembangunan SKPD, pelaksanaan pengembangan e-goverment serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

8) melaksanakan tugas kedinasana lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

C. Seksi Pemerintahan.

Seksi pemerintahan dipimpin oleh kepala seksi pemerintahan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada camat melalui sekretaris kecamatan. Seksi pemerintahan mempunyai tugas melakukan penyusunan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan umum, pengoordinasian kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan, serta pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa dan kelurahan.

Dalam melaksanakan tugas, kepala seksi pemerintahan mempunyai rincian tugas:

1. Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program kegiatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
2. Merencanakan kegiatan pemerintahan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. Membimbing pelaksanaan kegiatan pemerintahan umum, yang meliputi pengelolaan profil dan monografi Desa/Kelurahan dan Kecamatan, pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pemertahan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, fasilitasi, Koordinasi, dan pembinaan bimbingan teknis, sosialisasi, konsultasi wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional, pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional, penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila, dan pelaksanaan semua urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal serta pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di Kecamatan;
4. Membagi tugas pelaksanaan kegiatan pemerintahan umum;
5. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pemerintahan umum;

6. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan pemerintahan umum;
7. Mengumpulkan bahan dan melaksanakan kebijakan camat dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan/didelegasikan Bupati kepada Camat sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
8. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

D. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi pemberdayaan masyarakat dipimpin oleh kepala seksi pemberdayaan masyarakat berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan. Seksi pemberdayaan masyarakat mempunyai tugas melakukan penyusunan kegiatan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial di kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas, kepala seksi pemberdayaan masyarakat mempunyai rincian tugas:

1. Merencanakan kegiatan yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat; Membimbing pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat yang melputi : fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa dan kelurahan,
2. Membimbing pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan,
3. Membimbing pelaksanaan kegiatan penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah penyakit skala kecamatan, masalah pencemaran lingkungan, serta masalah kesejahteraan sosial di kecamatan dan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah/instansi terkait;
4. Membagi tugas pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat ;
5. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya.;
6. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat;
7. mengumpulkan bahan dan melaksanakan kebijakan camat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan/didelegasikan bupati kepada camat sesuai dengan lingkup tugasnya
8. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya

E. Seksi Ketentraman, Ketertiban Dan Perlindungan Masyarakat.

Seksi ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat dipimpin oleh kepala Seksi ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan. Seksi ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat mempunyai tugas melakukan penyusunan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, serta penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas, kepala seksi ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat mempunyai rincian tugas:

1. Merencanakan kegiatan yang terkait dengan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat ;membimbing pelaksanaan kegiatan tanggap bencana lingkup kecamatan,
2. membimbing pelaksanaan kegiatan fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di desa dan kelurahan, membimbing anggota Linmas yang berada di wilayah kerja kecamatan ;
3. membimbing pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan yang meliputi koordinasi dengan kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia, serta pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan
4. membagi tugas pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat di desa dan kelurahan ;
5. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya.;
6. membuat laporan pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat;
7. mengumpulkan bahan dan melaksanakan kebijakan camat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan/didelegasikan bupati kepada camat sesuai dengan lingkup tugasnya
8. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

F. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dipimpin oleh kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa mempunyai tugas melakukan penyususnan kegiatan bidang Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa serta pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas kepala seksi perekonomian dan pembangunan rincian tugas:

1. Merencanakan kegiatan yang terkait dengan perekonomian dan pembangunan;

2. Membimbing pelaksanaan kegiatan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang meliputi koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya dibidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
3. membimbing dan mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan;
4. membagi tugas pelaksanaan program kegiatan yang terkait dengan perekonomian dan pembangunan;
5. membuat laporan pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan perekonomian dan pembangunan;
6. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan perekonomian dan pembangunan dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
7. mengumpulkan bahan dan melaksanakan kebijakan camat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan/didelegasikan bupati kepada camat sesuai dengan lingkup tugasnya yang meliputi bidang ekonomi, pekerjaan umum dan pembangunan;
8. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya;

G. Seksi Pelayanan
1. Seksi pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g dipimpin oleh kepala seksi pelayanan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan.
2. Seksi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan penyususnan kegiatan pelayanan publik lingkup bidang perizinan dan non perizinan sesuai dengan kewenangan kecamatan.
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepala seksi pelayanan mempunyai rincian tugas:
   a. Merencanakan kegiatan yang terkait dengan pelayanan ;
   b. Membimbing pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan,
   c. Membimbing pelaksanaan kegiatan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan, pendistribusian dan pengumpulan formulir pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat yang berasal dari Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan pelayanan publik
   d. Membimbing penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi terkait lainnya,

e. Membimbing pelaksanakan standar pelayanan publik dan standar operasioanal prosedur pelayanan, pengaduan/keluhan dari masyarakat;
f. membagi tugas pelaksanaan program kegiatan yang terkait dengan pelayanan;
g. membuat laporan pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan pelayanan;
h. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan pelayanan dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya yang meliputi evaluasi terhadap kinerja pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
i. mengumpulkan bahan dan melaksanakan kebijakan camat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan/didelegasikan bupati kepada camat sesuai dengan lingkup tugasnya ;
j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

H. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok jabatan fungsional terdiri dari beberapa jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang tugasnya.

Kelompok jabatan fungsional dalam pelaksanaan tugas pokok berpedoman kepada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. bertugas sebagai pelaksanaan kegiatan kecamatan sesuai dengan kebutuhan.

Kelompok jabatan fungsional dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada camat.

Setiap jenis jabatan fungsional di koordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang di tunjuk di antara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Badan/Dinas Kelompok jabatan fungsional dalam pelaksanaan tugasnya dikoordinasikan oleh tenaga fungsional.

Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan Daerah yang menjadi tolak ukur dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Kecamatan Teluknaga adalah berdasarkan pada :

1. Misi Keempat, yaitu Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan dan akuntabel dengan strategi Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kecamatan melalui kebijakan Meningkatkan pelayanan Paten Kecamatan dan Kelurahan.
2. Misi Keenam, yaitu Mengembangkan inovasi daerah dalam rangka meningkatkan kualitas daya saing daerah, masyarakat dan pelaku pembangunan lainnya dengan strategi Meningkatkan Inovasi OPD melalui kebijakan Meningkatkan implementasi inovasi OPD.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja

Untuk merealisasikan misi, tujuan serta sasaran RPJMD tersebut perlu ditetapkan tujuan dan sasaran Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap Urusan baik urusan wajib maupun urusan pilihan yang dilakukan oleh Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang. Sedangkan Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan.

Tujuan Kecamatan Teluknaga Tahun 2025 adalah :

1. Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Berkualitas;
2. Meningkatkan Kinerja Inovasi Perangkat Daerah, dan
3. Meningkatkan Kinerja Perangkat Daerah

Adapun Sasaran Kecamatan Teluknaga Tahun 2025 adalah :

1. Meningkatnya Pelayanan Masyarakat serta meningkatnya Desa/Kelurahan dengan status berkembang;
2. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Dasar Masyarakat dan Lingkungan Hidup;
3. Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum;
4. Meningkatnya Upaya Pemberdayaan Masyarakat;
5. Meningkatnya Inovasi Kecamatan, dan
6. Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah.

3.3 Program dan Kegiatan

Arah kebijakan Pembangunan di Kecamatan Teluknaga diarahkan Kepada :

1. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pelayanan Pendidikan dan Kesehatan di tingkat Kecamatan;
2. Meningkatkan peran aktif dan Kontrol masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan untuk mencapai hasil yang diharapkan;
3. Meningkatkan pengawasan dan monitoring serta evaluasi program kegiatan yang telah direncanakan;

4. Meningkatkan hubungan kerja dengan seluruh lembaga pemerintah maupun non pemerintah;
5. Meningkatkan kinerja petugas pelayanan dengan SDM yang handal untuk mencapai pelayanan masyarakat yang maksimal;
6. Peningkatan transparansi, partisipasi dan mutu pelayanan melalui peningkatan akses dan sebaran informasi;

Rencana Kerja Perubahan disajikan bersama indikator kinerja, sedangkan program disajikan dengan mengacu kepada program yang relevan, sehingga rencana kerja Perubahan merupakan rincian yang sistematis dari program yang akan dilaksanakan oleh indikator kinerja kegiatan, Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tabel dilembaran berikut :

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU ANGGARAN
1	2	3	4	5
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA**	**Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan**	**100%**	**10.612.046.551,00**
7.01.01.2.01	**PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun**	**3**	**114.113.000,00**
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	54.600.000,00
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	45.038.000,00
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	14.475.000,00
7.01.01.2.02	**ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH**	**Jumlah laporan keuangan**	**2**	**5.949.692.463,00**
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	38	5.931.452.463,00
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2	18.240.000,00
7.01.01.2.05	**ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH**	**Jumlah Laporan Pembinaan Pegawai**	**2**	**100.249.480,00**
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	69.196.000,00
7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50	31.053.480,00
7.01.01.2.06	**ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH**	**Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**8**	**951.966.200,00**
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasirnnListrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	29.296.000,00
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	661.132.000,00
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	29.503.200,00
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1	74.246.000,000
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	27.947.000,00
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2	10.202.000,00
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2	89.160.000,00
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2	30.480.000,00

7.01.01.2.08	**PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Jumlah Laporan Jasa Penunjang**	**3**	**1.916.908.448,00**
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	60.000.000,00
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	283.616.880,00
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	1.573.291.568,00
7.01.01.2.09	**PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Jumlah\ Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**4**	**1.579.116.960,00**
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5	177.879.960,00
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10	327.007.000,00
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15	78.200.000,00
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	996.030.000,00
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar**	**100%**	**9.672.661.800,00**
		Persentase pemeliharaan Fasilitas Umum yang terpelihara	**100%**	
7.01.02.2.02	**PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN**	**Jumlah laporan pelayanan**	**2**	**23.240.800,00**
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2	23.240.800,00
7.01.02.2.03	**KOORDINASI PEMELIHARAAN PRASARANA DAN SARANA PELAYANAN UMUM**	**jumlah dokumen pemeliharaan**	**2**	**9.649.421.000,00**
7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	2	9.649.421.000,00
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan**	**100%**	**1.849.417.000,00**
7.01.03.2.01	**KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA**	**Jumlah Laporan Pemberdayaan**	**2**	**1.849.417.000,00**
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	13	50.090.000,00
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2	1.799.327.000,00
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti**	**100%**	**119.342.300,00**
7.01.04.2.01	**KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**jumlah laporan gangguan trantibum**	**2**	**119.342.300,00**
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2	119.342.300,00
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti**	**100%**	**135.870.000,00**
7.01.05.2.01	**PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH**	**jumlah rekomendasi yang dikeluarkan**	**2**	**135.870.000,00**
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahunrnn1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan	50	117.030.000,00

		Negara Kesatuan Republik Indonesia		
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	2	18.840.000,00
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase tertib administrasi pemerintahan desa**	**100%**	**137.619.000,00**
7.01.06.2.01	**FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASINNPEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**	**6**	**137.619.000,00**
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	2	41.200.000,00
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	2	45.160.000,00
7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	2	15.392.000,00
7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	2	16.517.000,00
7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	2	19.350.000,00

Dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan, Kecamatan Teluknaga sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang merupakan upaya-upaya khusus untuk melaksanakan serangkaian tindakan dalam mencapai tujuan dan sasaran, disamping itu juga kinerja pelayanan Kecamatan Teluknaga merupakan bagian integritas dalam proses perencanaan strategis pemerintah, guna terlaksanannya dan tercapainya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, maka sangat perlu sekali adanya program dan kegiatan yang akan dilaksanakan disuatu unit kerja serta dapat dipertanggung jawabkan dalam realisasi pelaksanaannya. Sejalan dengan hal tersebut diatas Kami menyadari bahwa dalam melaksanakan program dan kegiatan tersebut masih mengalami hambatan karena keterbatasan sarana dan prasarana pendukung serta kurangnya personil.

Rencana tindaklanjut Kecamatan Teluknaga pada tahun 2026 mendatang akan menetapkan 6 program, 13 kegiatan sesuai dengan program nasional yang dilaksanakan sesuai APBD-P tahun 2025, Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Teluknaga tahun 2025 merupakan dokumen rencana kerja Perubahan yang berfungsi sebagai pedoman perencanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan 1 (satu) Semester kedepan.

BAB IV
PENUTUP

Dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, maka diharapkan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2025 dapat digunakan sebagai pedoman kerja bagi aparatur Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang sesuai dengan Visi dan Misi yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.

Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama 1 (satu) Semester Tahun 2025, Rencana Kerja Perubahan (Renja) juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu semester bagi seluruh jajaran Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang. Rencana Kerja (Renja) Perubahan juga memberikan umpan Sbalik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para Pimpinan dan seluruh staf Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2025 adalah Dokumen Perencanaan Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2025, Renja Perubahan ini diharapkan mampu menjadi acuan dan pedoman Penyelenggaraan Program dan Kegiatan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang pada tahun 2025 agar sesuai dengan Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan yang ditetapkan.

Dengan adanya Renja Perubahan Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan.

Melalui Rencana Kerja (Renja) Perubahan ini diharapkan agar setiap aparatur yang mendukungnya, mampu melakukan evaluasi dan instrospeksi guna meningkatkan capaian kinerja yang lebih baik melalui upaya memahami tugas dan meningkatkan pelaksanaannya dengan penuh tanggungjawab dan kerja keras. Akhir kata, Semoga Rencana Kerja (Renja) Perubahan tahun 2025 ini dapat bermanfaat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

45. Kecamatan Cisoka

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan kepada setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun, dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan dalam Renstra Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Perubahan Renja Perangkat Daerah, dalam hal ini Renja Kecamatan Cisoka, mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, mengingat Perubahan Renja Kecamatan Cisoka merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari Visi, Misi dan Program Kecamatan Cisoka, sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Renja merupakan dasar atau acuan memasukkan program kegiatan ke dalam KUA dan PPAS, dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan Tahun 2025. Selain itu, Renja merupakan alat untuk evaluasi pelaksanaan program kegiatan instansi, untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Perubahan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Mengingat arti strategis dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka dalam proses penyusunan hingga penetapan dokumen Renja Perubahan Perangkat Daerah mengikuti tata cara dan alur penyusunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

Seiring hal tersebut di atas, dalam penyusunan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan RKPD Perubahan. Oleh karena itu penyusunan rancangan Perubahan Renja SKPD dapat dikerjakan secara paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan melihat kondisi terkini dari Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Cisoka Tahun 2025 adalah :

1. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
5. Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembar Negara Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
14. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4578)

16. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/200/II/BANGDA/2008; perihal pedoman penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 11).
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Cisoka Tahun 2025 adalah menyediakan acuan arah kebiajakan pembangunan yang secara umum dilaksanakan di Kecamatan Cisoka Kabupaten Tangerang tahun 2025.

Tujuannya adalah agar dokumen perencanaan yang disusun dapat dijadikan acuan oleh berbagai pihak yang akan melaksanakan kegiatan di Kecamatan Cisoka sehingga terwujud sinergitas antar pemangku kewenangan yang ada di Kecamatan Cisoka. Dan dapat dijadikan bahan evaluasi bagi Kabupaten dalam pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Cisoka serta dapat dijadikan bahan evaluasi bagi camatdalam melaksanakan tugas dan fungsinya pada tahun 2025 ini.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan secara ringkas tentang latar belakang renja PD, proses penyusunan, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU

Menguraikan hasil evaluasi anggaran dan capaian *kinerja renja tahun 2025*

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Menguraikan tujuan dan sasaran perubahan renja kecamatan Cisoka tahun 2025 dan program kegiatan yang akan berjalan di tahun 2025 dan Menguraikan perubahan rencana kerja dan pendanaan Kecamatan Cisoka Tahun Anggaran 2025.

BAB IV PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN CISOKA TRIWULAN I

2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja Triwulan I dan Pencapaian Renstra Kecamatan Cisoka

Proses penyusunan suatu perencanaan erat kaitannya dengan proses evaluasi,dari hasil evaluasi dapat teridentifikasi dua hal yaitu sejauh mana proses perencanaanpembangunan dilaksanakan oleh SKPD dan permasalahan-permasalahan yang menghambat pelaksanaan perencanaan pembangunan tersebut. Hasil evaluasi tersebut sangat penting sebagai masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaanpembangunan pada tahun yang akan datang.

Rencana Strategis Kecamatan Cisoka Tahun 2024-2026 yang memuat indikator keberhasilan suatu proses perencanaan pembangunan untuk kurun waktu 3 (tiga) tahun, dijadikan tolak ukur untuk menilai sejauh mana perencanaan pembangunan telah dilaksanakan. Renstra tersebut merupakan panduan Kecamatan Cisoka dalam melaksanakan program dan kegiatannya.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Cisoka Kabupaten Tangerang berpedoman pada RPD tahun Kedua yaitu 2025 dan RKPD Perubahan Kabupaten Tangerang tahun 2025 dan Surat Edaran Bupati Tangerang tentang Penyusunan Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah dan Pedoman Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Kabupaten Tangeran tahun 2025.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Cisoka Kabupaten Tangerang tahun 2025 adalah upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Tangerang dengan berpedoman dengan dokumen perencanaan.

Pada tahun anggaran 2025 disediakan plafon anggaran untuk Kecamatan Cisoka sebesar **Rp. 16.867.639.078,00** berkurang dari anggaran murni sebelumnya yaitu sebesar **Rp 17.562.807.678,00** dikarenakan terjadi pergeseran Efisiensi Anggaran pada triwulan 1. Dari Plafon Anggaran tersebut sampai dengan triwulan 1 tahun 2025 sudah terealisasi sebesar **Rp. 3.615.664.263,00 (Tiga Milyar Enam Ratus Lima Belas Juta Enam Ratus Enam Puluh Enam Ribu Dua Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah)** atau mencapai 21,13% . Belum terserapnya keseluruhan Anggaran di Kecamatan Cisoka dikarenakan pelaksanaan kegiatan baru sampai dengan triwulan ke 1 dan sedang berjalan triwulan ke 2.

Berikut akan disajikan Tabel Review Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Triwulan I Tahun 2025 dan pencapaian kinerja Renstra Kecamatan Cisoka, yang bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Peramgkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra SKPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Review didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD Triwulan 1 dan perkiraan pelaksanaan DPA Kecamatan Cisoka tahun berjalan (tahun 2025). Adapun gambaran selengkapnya tentang evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Cisoka tahun 2025 sampai dengan triwulan 1 disajikan sebagaimana **tabel 1** berikut:

Tabel 1. Realisasi Anggaran Tahun 2025 sampai dengan triwulan I Kecamatan Cisoka

Program / Kegiatan	Keuangan			Kinerja		
	Pagu Anggaran	Realisasi	%	Target Kinerja	Capaian Kinerja	%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	**8.282.141.983,00**	**2.146.558.279,00**	**25,92**			
PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	**181.902.000,00**	**26.725.000,00**	**14,69**	**6 Dokumen**	**6 Dokumen**	**100%**
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	90.682.000,00	6.570.000,00	7,25			
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	38.660.000,00	10.665.000,00	27,59			
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	52.560.000,00	9.490.000,00	18,06			
ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	**4.912.691.233,00**	**1.232.731.558,00**	**25,09**	**2 Dokumen**	**2 Dokumen**	**100%**
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.857.092.233,00	1.215.694.058,00	25,03			
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	55.599.000,00	17.037.500,00	30,64			
ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	**17.365.400,00**	**3.000.000,00**	**17,28**	**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**100%**
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	17.365.400,00	3.000.000,00	17,28			
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	**173.296.000,00**	**0,00**	**0,00**	**24 Orang**	**24 Orang**	**100%**
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	93.989.000,00	0,00	0,00			
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	79.307.000,00	0,00	0,00			
ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	**974.238.800,00**	**345.415.200,00**	**35,45**	**7 Jenis**	**7 Jenis**	**100%**
Penyediaan Komponen InstalasirnnListrik/Penerangan Bangunan Kantor	33.089.000,00	28.393.500,00	85,81			
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	356.603.100,00	7.070.000,00	1,98			
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	83.041.900,00	79.245.700,00	95,43			
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	170.521.800,00	168.143.000,00	98,60			
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	42.388.000,00	14.620.000,00	34,49			
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	60.000.000,00	0,00	0,00			

Fasilitasi Kunjungan Tamu	139.830.000,00	34.957.500,00	25,00			
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	88.765.000,00	12.985.500,00	14,63			
PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	**269.935.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2 Unit**	**2 Unit**	**100%**
Pengadaan Mebel	269.935.000,00	0,00	0,00			
PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	**1.229.623.568,00**	**281.710.802,00**	**22,91**	**3 Jenis**	**3 Jenis**	**100%**
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	14.600.000,00	0,00	0,00			
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	263.850.000,00	39.110.802,00	14,82			
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	951.173.568,00	242.600.000,00	25,51			
PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	**523.089.982,00**	**256.975.719,00**	**49,13**	**3 Jenis**	**3 Jenis**	**100%**
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	266.899.952,00	35.587.744,00	13,33			
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	33.900.000,00	0,00	0,00			
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	222.290.030,00	221.387.975,00	99,59			
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**5.704.444.895,00**	**815.669.384,00**	**14,30**			
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN	56.258.800,00	16.759.600,00	29,79	**3 Jenis**	**3 Jenis**	**100%**
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	56.258.800,00	16.759.600,00	29,79			
KOORDINASI PEMELIHARAAN PRASARANA DAN SARANA PELAYANAN UMUM	5.648.186.095,00	798.909.784,00	14,14	**73 Titik**	**73 Titik**	**100%**
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	5.648.186.095,00	798.909.784,00	14,14			
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**2.355.023.600,00**	**553.005.000,00**	**23,48**			
KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA	**2.355.023.600,00**	**553.005.000,00**	23,48	**13 Kelompok**	**13 Kelompok**	**100%**

Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	102.340.400,00	51.700.000,00	50,52			
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2.252.683.200,00	501.305.000,00	22,25			
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**108.679.200,00**	**33.348.000,00**	**30,68**			
KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**108.679.200,00**	**33.348.000,00**	**30,68**	**3 Kali**	**3 Kali**	**100%**
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	108.679.200,00	33.348.000,00	30,68			
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**375.591.800,00**	**6.001.200,00**	**1,60**			
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH	**375.591.800,00**	**6.001.200,00**	**1,60**	**2 Jenis**	**2 Jenis**	**100%**
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahunrnn1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	323.060.600,00	0,00	0,00			
Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	41.301.200,00	2.871.200,00	6,95			
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	11.230.000,00	3.130.000,00	27,87			
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**41.757.600,00**	**8.844.000,00**	**21,18**			
FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	41.757.600,00	8.844.000,00	21,18	**10 Desa**	**10 Desa**	**100%**
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	41.757.600,00	8.844.000,00	21,18			
JUMLAH BELANJA DAERAH	**16.867.639.078,00**	**3.563.425.863,00**	**21,13**			

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025, pelaksanaan kinerja Kecamatan Cisoka ditunjang dengan program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 2 (T-C.29) Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 Kabupaten Tangerang

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan sampai dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (Tahun 2025)	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8 (7/6)*100	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
701	**KECAMATAN**										
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan**	**Persen**	100	100	100	100	100	100	300	3,00
7.01.01		**Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**Persen**	100	100	100	100	100	100	300	3,00

7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen	6	6	6	6	100	6	18	3,00
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya laporan keuangan	dokumen	2	2	2	2	100	2	6	3,00
7.01.01.2.05	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan Barang Milik Daerah	dokumen	1	-	1	1	100	1	2	2,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang difasilitas	orang	24	24	24	24	100	24	72	3,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	jenis	7	7	7	7	100	7	21	3,00
7.01.01.2.06	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	Unit	2	2	2	2	100	2	6	3,00
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah	Tersedianya Jasa Penunjang	jenis	3	3	3	3	100	3	9	3,00
7.01.01.2.07	Pemeliharaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	jenis	3	3	3	3	100	3	9	3,00
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARA**	**Prosentase terpenuhinya**	**Persen**	100	100	100	100	100	100	300	2,00

	AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**PATEN sesuai dengan standar** **Persentase Infrastruktur dasar yang dipelihara**	**Persen**	100	97	100	100	100	100	297	2,97
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan	Pemenuhan sarana dan prasarana Paten di Kecamatan	Jenis	3	3	3	3	100	3	9	3,00
7.01.02.2.03	Koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum	Jumlah infrastruktur yang dipelihara	titik	73	66	70	70	100	73	206	2,82
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Presentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan**	**Persen**	100	100	100	100	100	100	300	3,00
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	Kelompok	13	13	13	13	100	13	39	3,00
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Laporan Trantibum yang difasilitasi**	**Persen**	100	100	100	100	100	100	300	3,00

7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kegiatan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Kali	3	3	3	3	100	3	9	3,00
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Prosentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum**	**Persen**	83	-	80	80	100	83	160	1,92
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti pembinaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jenis	2	-	2	2	100	2	4	2,00
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase desa dengan laporan keuangan dan administrasi baik**	**Persen**	100	97	100	100	100	100	297	2,97
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa dengan laporan keuangan baik	Desa	10	10	10	10	100	10	30	3,00

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Kecamatan Cisoka

Kinerja pelayanan Kecamatan Cisoka dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja :

a. Meningkatnya pelayanan masyarakat serta meningkatnya desa/kelurahan dengan status minimal Maju
b. Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar masyarakat dan lingkungan hidup
c. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum
d. Meningkatnya upaya pemberdayaan masyarakat
e. Meningkatnya inovasi kecamatan
f. Meningkatnya akuntabilitas Perangkat Daerah

Lingkup analisis kinerja pelayanan di Kecamatan Cisoka Kabupaten Tangerang meliputi analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal yang dapat menghasilkan kesimpulan analisis berupa daftar prioritas faktor lingkungan, baik internal maupun eksternal, serta dampak terhadap kelangsungan organisasi pada masayang akan datang. Yang selanjutnya akan berpengaruh pada hubungan internal organisasi pada gilirannya dapat ditentukan oleh faktor kunci keberhasilan, antara lain :

1. Lingkungan
   Internal
   Kekuatan :
   - Visi dan misi organisasi yang jelas
   - Kekuatan hukum tentang tugas pokok dan fungsi Kecamatan
   - Adanya alokasi anggaran bagi Kecamatan
   - Kewenangan koordinasi di tingkat Kecamatan
   - Adanya sarana dan prasarana yang memadai

   Kelemahan :
   - Jumlah dan kualitas SDM yang belum memadai
   - Belum tertib dan lemahnya sistem administrasi perkantoran
   - Belum optimalnya penyusunan kebijakan dan perencanaan

2. Lingkungan
   Eksternal
   Peluang:
   - RPD Kabupaten Tangerang Tahun 2024 - 2026
   - Agenda pembangunan tahunan Kabupaten Tangerang
   - Dukungan dan partisipasi masyarakat luas
   - Diklat peningkatan kualitas aparatur
   - Kehidupan sosial, budaya dan keragaman masyarakat
   - Kebutuhanakan rasa aman, tertib dan tentram

   Ancaman :
   - Kecendrungan masyarakat untuk mengabaikan peraturan dan kewajiban yang mengikat
   - Kondisi ekonomi masyarakat yang masih relatif rendah
   - Belum adanya batas wilayah yang permanen
   - Partisipasi masyarakat yang masih kurang

Pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Cisoka dapat dilihat sebagaimana Tabel 3 berikut :

Tabel 3 (T-C.30) Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Cisoka Kabupaten Tangerang

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat	85,00	88.90	89.00	89,10	83,75	84,09	89.00	89,10	Pada tahun 2024 terjadi kenaikan realisasi capaian dibandingkan tahun 2023. namun belum memenuhi target Renstra Perangkat Daerah
2	Nilai AKIP Kecamatan Cisoka	Nilai AKIP	Hasil Nilai AKIP	80,00	80,00	83,00	85,00	69,30	70,45	83,00	85,00	Di Tahun 2023 dan 2024 mengalami penurunan nilai dari target yang telah ditetapkan dikarenakan adanya kebijakan baru penilaian dari tim Inspektorat
3	Presentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Presentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Hasil Presentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	71,40	-	-	-	71,40	-	-	-	Telah sesuai target namun di Tahun 2024 dan 2025 sudah tidak menjadi standar indikator kinerja utama kecamatan

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Cisoka bahwa ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut :

1. Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Tangerang kepada Camat di bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Tangerang;

2. Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yangada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur;
3. Harus adanya upaya peningkatan daya dukung infrastruktur pelayanan publik di Kecamatan Cisoka Kabupaten Tangerang. Permasalahan strategi yang muncul adalah kualitas pelayanan publik yaitu pelayanan dasar masyarakat perlu ditingkatkan, hal ini dilakukan mengingat dengan kondisi masyarakat yang semakin kritis serta cerdas saat ini perlu dilakukannya transparansi, akurasi dalam pelayanan publik;
4. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Hal ini dapat terlihat dari seringnya terjadi kebiasaan buang sampah sembarangan yang dilakukan oleh masyarakat sekitar Kecamatan Cisoka. Hal ini perlu ditindaklanjuti oleh petugas dalam menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum di wilayah kecamatan cisoka dengan memberikan himbauan serta sanksi tegas dan melakukan upaya pencegahan dengan melakukan monitoring rutin dalam menjaga kebersihan lingkungan
5. Peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dan segala kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan, karena tidak mungkin terwujud suatu pelaksanaan kegiatan dan pembangunan tanpa dukungan masyarakat. Karena semua yang dilaksanakan oleh Kecamatan tujuannya adalah demi kepentingan masyarakat di Kecamatan Cisoka. Peran serta masyarakat yang sekarang ini terlibat dalam kegiatan yaitu kegiatan musrenbang, fasilitasi pemeliharaan kebersihan
6. Ketahanan pangan masyarakat yang harus dikuatkan melalui pertanian dan peternakan, sehingga perlu adanya pelatihan-pelatihan kepada masyarakat baik yang menyangkut tehnik di lapangan maupun pemasarannya serta perlunya dukungan peralatan yang memadai demi meningkatkan hasil dari pertanian dan peternakan. Dan pendukung pengairan pertanian masyarakat yang dangat diperhatikan demi mendukung peningkatan kualitas pertanian.
7. Dunia usaha dan investasi yang kian hari semakin berkembang perlu dipersiapkan sumber daya manusia yang mampu bersaing dalam dunia usaha dan sesuai dengan kebutuhan industri, sehingga masyarakat Cisoka dapat menempati posisi- posisi yang telah disediakan oleh perusahaan sehingga akan meningkatkan tarap perekonomian masyarakat. Sehingga jumlah masyarakat miskin di Kecamatan Cisoka dapat berkurang.
8. Akses ke kota Kecamatan dan pada pelayanan pendidikan dan kesehatan yang semakin memadai dapat dinikmati masyarakat, sehingga tidak ada masyarakat yang tidak merasakan pelayanan kesehatan dan pendidikan. Dan

infrasturuktur pendidikan serta kesehatan yang terus dibenahai sehingga masyarakat akan merasa nyaman dalam mendapatkan pelayanannya.

2.4. Review Terhadap RKPD Perubahan

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Cisoka Tahun 2025 merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam arah kebijakan RPJPD Kabupaten Tangerang tahun 2024-2026 yang dijabarkan dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Cisoka Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026. Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Cisoka Tahun 2025 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017.

Dalam konteks perencanaan pembangunan, Kecamatan Cisoka Kabupaten Tangerang dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan, melayani/memenuhi kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, dalam era globalisasi, Kecamatan Cisoka dituntut untuk siap dan sanggup membuat/menyusun suatu perencanaan yang baik, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Untuk lebih jelasnya mengenai review terhadap RKPD Perubahan Tahun 2025 dapat dilihat Tabel 4 (T-C.31) berikut ini:

Tabel 4 (T-C.31) Review Terhadap RKPD Perubahan Tahun 2025 Kecamatan Cisoka Kabupaten Tangerang

NO					Rancangan RKPD Perubahan					Hasil Analisa Kebutuhan					
					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Capaian Target	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Capaian Target	Kebutuhan Dana (Rp.)	Catatan Penting
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	**01**				**Kecamatan**					**Kecamatan**					
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**					**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**					
7	01	01	**2.01**	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Cisoka	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	90.682.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Cisoka	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	90,682,000	
7	01	01	**2.01**	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Cisoka	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	1 Laporan	41.060.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Cisoka	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	1 Laporan	41,060,000	

							Realisasi Kinerja SKPD					Realisasi Kinerja SKPD			
7	01	01	**2.01**	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Cisoka	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	52.560.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Cisoka	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	52.560.000	
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**					**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**					
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Cisoka	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	14 Orang/Bulan	4.725.463.138	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Cisoka	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	20 Orang/Bulan	4.725.463.138	
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kec. Cisoka	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran/SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran/SKPD	4 Laporan	55.599.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kec. Cisoka	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran/SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran/SKPD	4 Laporan	55.599.000	
7	**01**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**					**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**					

7	01	01	2.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Kec. Cisoka	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	19.765.400	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Kec. Cisoka	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	19.765.400	
7	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**					**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**					
	01	01	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Kec. Cisoka	Jumlah paket Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	24 Paket	93.989.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Kec. Cisoka	Jumlah paket Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	24 Paket	93.989.000	
7	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kec. Cisoka	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	24 Orang	79.307.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kec. Cisoka	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	24 Orang	79.307.000	
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**					**Administrasi Umum Perangkat Daerah**					
	01	01	2.06	1	Penyediaan komponen instalasi listrik/penera	Kec. Cisoka	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan	5 Paket	33.089.000	Penyediaan komponen instalasi listrik/pener	Kec. Cisoka	Jumlah paket komponen instalasi listrik/pener	5 Paket	33.089.000	

					ngan bangunan		bangunan kantor yang disediakan			angan bangunan		angan bangunan kantor yang disediakan			
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Cisoka	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	8 Paket	772.883.100	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Cisoka	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	8 Paket	779.449.100	
	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kec. Cisoka	Jumlah paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	5 Paket	86.552.500	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kec. Cisoka	Jumlah paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	5 Paket	88,616,500	
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Cisoka	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12 Paket	170.521.800	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Cisoka	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12 Paket	170.521.800	
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec. Cisoka	Jumlah paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	2 Paket	48.286.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec. Cisoka	Jumlah paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	2 Paket	48.286.000	
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	Kec. Cisoka	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan	5 Dokumen	60.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	Kec. Cisoka	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan	5 Dokumen	10.000.000	

					Perundang-undangan		Perundang-undangan yang disediakan			Perundang-undangan		Perundang-undangan yang disediakan			
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec. Cisoka	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	146.580.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec. Cisoka	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	157.312.000	
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Cisoka	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	85.011.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Cisoka	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	84.944.000	
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**					**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**					
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Kec. Cisoka	Jumlah paket Mebel yang disediakan	2 Unit	269.935.000	Pengadaan Mebel	Kec. Cisoka	Jumlah paket Mebel yang disediakan	2 Unit	269.935.000	
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**					**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**					
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Cisoka	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	14.600.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Cisoka	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	14.600.000	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	Kec. Cisoka	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	12 Laporan	237.678.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	Kec. Cisoka	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	12 Laporan	203.895.084	

					Air dan Listrik		Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			Daya Air dan Listrik		Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Cisoka	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	918.416.784	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Cisoka	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	918.416.784	
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**					**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**					
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Cisoka	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	6 Unit	275.844.952	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Cisoka	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	6 Unit	280.776.952	
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Cisoka	Jumlah Peralatan dan Mesin yang dipelihara	2 Unit	33.900.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Cisoka	Jumlah Peralatan dan Mesin yang dipelihara	2 Unit	63.900.000	

7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Cisoka	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipeliharan/direhabilitasi	4 Unit	279.576.714	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Cisoka	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipeliharan/ direhabilitasi	4 Unit	478.282.925	
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**					**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**					
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**					**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**					
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Cisoka	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	56.258.800	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Cisoka	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	56.258.800	
7	**01**	**02**	**2.03**		**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**					**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**					
7	01	02	2.03	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan	Kec. Cisoka	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam	4 Dokumen	5.682.816.095	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam	Kec. Cisoka	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang	4 Dokumen	8.549.437.800	

					Prasarana Pelayanan Umum		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum		Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum			
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**					**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**					
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. Cisoka	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10 Lembaga Kemasyarakatan	102.340.400	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. Cisoka	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10 Lembaga Kemasyarakatan	102.340.400	
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Cisoka	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6 Laporan	2.182.465.700	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Cisoka	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6 Laporan	2.232.425.700	

7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**					**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**					
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**					**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**					
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Cisoka	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	3 Laporan	108.679.200	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Cisoka	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	3 Laporan	108.679.200	
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH UMUM**					**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH UMUM**					
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**					**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**					
7	01	05	2.01	01	Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengalaman pancasila Pelaksanaan	Kec. Cisoka	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapka	50 Orang	323.060.600	Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengalaman	Kec. Cisoka	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka	50 Orang	323.060.600	

					Undang-undang Dasar Republik Negara Indonesia Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemerintahan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		n pengalaman pancasila Pelaksanaan Undang-undang Dasar Republik Negara Indonesia Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemerintahan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia			pancasila Pelaksanaan Undang-undang Dasar Republik Negara Indonesia Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemerintahan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		memantapkan pengalaman pancasila Pelaksanaan Undang-undang Dasar Republik Negara Indonesia Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemerintahan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia			
7	01	05	2.01	03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kec. Cisoka	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	50 Orang	41.301.200	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kec. Cisoka	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	50 Orang	41.301.200	
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi	Kec. Cisoka	Jumlah dokumen Tugas Forum	50 Dokumen	11.230.000	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi	Kec. Cisoka	Jumlah dokumen Tugas Forum	50 Dokumen	11.230.000	

					Pimpinan di Kecamatan		Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			Pimpinan di Kecamatan		Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**					**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**					
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**					**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**					
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Cisoka	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	10 Dokumen	41.757.600	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Cisoka	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	10 Dokumen	41.757.600	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Perubahan Usulan Program dan Kegiatan Kecamatan Cisoka pada tahun 2025 dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum dan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati dalam rangka penguatan otonomi daerah diarahkan pada :

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang menjadi kewenangan kecamatan dan peningkatan kualitas aparaturnya;
2. Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaanpemerintahan desa;
3. Upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, dan koordinasi dengan Muspika yang ada di Kecamatan Cisoka.
4. Mendorong kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi;
5. Peningkatan semua infrastruktur yang ada di desa-desa se Kecamatan Cisoka. Baik sarana jalan, irigasi dan saluran-saluran air serta sarana pendidikan serta kesehatan.

Telaah usulan Program dan Kegiatan masyarakat ini didasari oleh pemikiran masyarakat melalui musrenbang yang telah dilakukan dan perlunya peningkatan peran serta masyarakat dalam melaksanakan musyawarah pembangunan baik yang dilaksanakan di desa maupun di Kecamatan.

BAB III
PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN CISOKA 2025

Pada Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan PD Tahun 2025 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian visi, misi, dan tujuan RPJPD Kabupaten Tangerang 2024-2026.

Untuk mencapai tujuan tersebut Renstra PD Kecamatan Cisoka menetapkan 1 (satu) tujuan, yaitu :

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan publik kecamatan Cisoka

Dalam rangka mendukung pencapaian Rencana Strategis tersebut ditetapkan 2 (dua) sasaran strategis antara lain :

1. Terpenuhinya pelayanan publik sesuai dengan standar kecamatan
2. Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja

Program dan kegiatan yang ada di Perangkat Daerah Kantor Kecamatan Cisoka pada dasarnya masih tetap mengacu dan pada tahun yang lalu dan penambahan disesuaikan dengan tuntuntan perkembangan jaman dan kebutuhan.

Pada tahun anggaran 2025 Kecamatan Cisoka Kabupaten Tangerang merencanakan akan melaksanakan sebanyak 6 (Enam) program, 14 (Empat belas) kegiatan yang di dukung oleh 32 (Tiga puluh dua) Sub Kegiatan, terlampir pada Tabel di bawah ini:

Tabel 5. Perubahan Rencana Kerja Pendanaan Kecamatan Cisoka Tahun Anggaran 2025

No	Kode Rekening	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Subkegiatan	Perubahan Rencana Tahun 2025					Penanggung Jawab
				Lokasi	Satuan	Target Capaian Kinerja	Rp.	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	**10**
		Sasaran 2. Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja	**Nilai AKIP Kecamatan Cisoka**		**Nilai**	**83,00**		**PAD**	
6	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan**	**Kec. Cisoka**	**Persen**	**100,00**	**8.591.300.388**	**PAD**	
			Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	**Kec. Cisoka**	**Persen**	**100,00**		**PAD**	
		Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**dokumen**	**6,00**	**184.302.000**	**PAD**	
		Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Dokumen	4	90.682.000	PAD	
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Laporan	1	41.060.000	PAD	

		Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Laporan	1	52.560.000	PAD	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Tersedianya laporan keuangan**		**dokumen**	**2,00**	**4.781.062.138**	**PAD**	
		Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		Orang/Bulan	14	4.725.463.138	PAD	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Laporan	4	55.599.000	PAD	
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Jumlah laporan Barang Milik Daerah**		**dokumen**	**1,00**	**19.765.400**	**PAD**	
		Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		Laporan	1,00	19.765.400	PAD	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Jumlah pegawai yang difasilitas**		**Orang**	**24,00**	**173.296.000**	**PAD**	
		Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		Paket	24	93.989.000	PAD	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		Orang	24	79.307.000	PAD	

		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah jenis kegiatan administrasi umum Perangkat Daerah**		**jenis**	**7,00**	**1.402.923.400**	**PAD**	
		Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan		Paket	5	33.089.000	PAD	
		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan		Paket	8	772.883.100	PAD	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan		Paket	5	86.552.500	PAD	
		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan		Paket	12	170.521.800	PAD	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan		Paket	2	48.286.000	PAD	
		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan		Dokumen	5	60.000.000	PAD	
		Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		Laporan	12	146.580.000	PAD	
		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Laporan	12	85.011.000	PAD	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Barang Milik Daerah**		**Unit**	**2,00**	**269.935.000**	**PAD**	

		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		Unit	2,00	269.935.000	PAD	
		Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah	**Jumlah Jenis Kegiatan Jasa Penunjang**		**jenis**	**3,00**	**1.170.694.784**	**PAD**	
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Laporan	12	14.600.000	PAD	
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Laporan	12	237.678.000	PAD	
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Laporan	12	918.416.784	PAD	
		Pemeliharaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	**Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**jenis**	**3,00**	**589.321.666**	**PAD**	
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		Unit	6	275.844.952	PAD	
		Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		jenis	2	33.900.000	PAD	
		Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Unit	4	279.576.714	PAD	

		Sasaran 1. Terpenuhinya Pelyanan Publik Sesuai dengan Standar Kecamatan	**Nilai Survey Kepuasan Masyarakat**		**Persen**	**89,00**		**PAD**	
2	**07.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar**	**Kec. Cisoka**	**Persen**	**100,00**	**5.739.074.895**	**PAD**	**Camat Cisoka**
			Persentase Infrastruktur dasar yang dipelihara	**Kec. Cisoka**	**Persen**	**100,00**		**PAD**	
	7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan**	**Jumlah laporan pelayanan**		**Jenis**	**3,00**	**56.258.800**	**PAD**	
	7.1.2.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Laporan	2,00	56.258.800	PAD	
	7.01.02.2.03	**Koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum**	**Jumlah infrastruktur yang dipelihara**		**Titik**	**73,00**	**5.682.816.095**	**PAD**	
	7.1.2.2.03.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum		Dokumen	4,00	5.682.816.095	PAD	
3	**07.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Presentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan**	**Kec. Cisoka**	**Persen**	**100,00**	**2.284.806.100**	**PAD**	**Camat Cisoka**

	7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Jumlah Laporan Pemberdayaan**		**Kelompok**	**13,00**	**2.284.806.100**	**PAD**	
	7.1.3.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		Lembaga Kemasyarakatan	10,00	102.340.400	PAD	
	7.1.3.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Laporan	6,00	2.182.465.700	PAD	
4	**07.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti**	**Kec. Cisoka**	**Persen**	**100,00**	**108.679.200**	**PAD**	**Camat Cisoka**
	7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Jumlah kegiatan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan**		**Kali**	**3,00**	**108.679.200**	**PAD**	
	7.1.4.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Laporan	3,00	108.679.200	PAD	
5	**7.1.5.01**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti**	**Kec. Cisoka**	**Persen**	**83,00**	**375.591.800**	**PAD**	**Camat Cisoka**
	7.1.5.01.2.09	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Jumlah Orang yang mengikuti pembinaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**		**Jenis**	**2,00**	**375.591.800**	**PAD**	

	7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengalaman pancasila Pelaksanaan Undang-undang Dasar Republik Negara Indonesia Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemerintahan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		Orang	50,00	323.060.600	PAD	
	7.01.05.2.01.04	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa		Orang	50,00	41.301.200	PAD	
	7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		Dokumen	50,00	11.230.000	PAD	
6	**07.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase tertib administrasi pemerintahan desa**	**Kec. Cisoka**	**Persen**	**100,00**	**41.757.600**	**PAD**	**Camat Cisoka**
	7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Jumlah desa dengan laporan keuangan baik**		**Desa**	**10,00**	**41.757.600**	**PAD**	
	7.1.6.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa		Dokumen	10,00	41.757.600	PAD	

BAB IV
PENUTUP

4.1 Catatan Penting dalam Penyusunan Renja

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Cisoka Kabupaten Tangerang Tahun 2025 berupa program dan kegiatan yang akan dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat Kecamatan Cisoka Kabupaten Tangerang berdasarkan sasaran-sasaran yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tangerang tahun 2024-2026 dan Rencana Strategis (RENSTRA) transisi Kecamatan Cisoka Kabupaten Tangerang tahun 2024-2026. Untuk mencapai sasaran tersebut harus menerapkan prinsip-prinsip efektif, efisien, transparansi dan akuntabilitas.

Guna memperoleh optimalisasi pencapaian hasil pada pelaksanaan program dan kegiatan, mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan dalam satu program maupun antar program, dalam satu instansi maupun antar instansi dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Cisoka Kabupaten Tagerang.

Untuk memperoleh keterpaduan dan sinkronisasi dalam pelaksanaan program/kegiatan yang telah direncanakan, harus melalui proses musyawarah antar pelaku pembangunan melalui tahap forum musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) agar program/kegiatan terintegrasi baik antar kegiatan dan program.

4.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan sebagai pengganti Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka kaidah-kaidah penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Cisoka Kabupaten Tangerang tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Cisoka Kabupaten Tangerang berpedoman pada RPD tahun kedua yaitu 2025 dan RKPD Perubahan Kabupaten Tangerang tahun 2025.
2. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Cisoka Kabupaten Tangerang tahun 2025 adalah upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan yang bersumber dari dana APBD Perubahan Kabupaten Tangerang dengan berpedoman pada dokumen perencanaan.

4.3 Rencana Tindak Lanjut

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Cisoka Kabupaten Tangerang tahun 2025 dilakukan sebagai upaya untuk menciptakan keselarasan atas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Kabupaten Tangerang tahun 2025

sehingga tercipta sinergi dalam pelaksanaan pembangunannya.

Pada akhirnya apa yang telah menjadi Program dan Kegiatan pada Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Cisoka Kabupaten Tangerang tahun 2025 diharapkan dapat meningkatkan kinerja aparatur dalam memberikan layanan organisasi untuk menjawab peluang dan tantangan pembangunan daerah di Kabupaten Tangerang dan tentunya menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Kecamatan Cisoka Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2025.

63. Rumah Sakit Umum Daerah Pakuhaji

BAB I
PENDAHULUAN

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) merupakan tahapan penting dalam rangka penyesuaian terhadap pelaksanaan rencana kerja perangkat daerah yang telah ditetapkan sebelumnya. Penyusunan Renja Perubahan dilakukan untuk menyesuaikan kebijakan, program, dan kegiatan perangkat daerah dengan perkembangan kondisi aktual, hasil evaluasi capaian kinerja, serta perubahan kebijakan yang terjadi pada tingkat nasional, provinsi, maupun daerah.

Dalam prosesnya, penyusunan Perubahan Renja PD mengacu pada arah kebijakan yang tertuang dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Perubahan RKPD). Oleh karena itu, penyusunan Renja Perubahan dilaksanakan secara simultan dengan penyusunan Perubahan RKPD, dengan terlebih dahulu melakukan penelaahan terhadap kondisi eksisting, evaluasi pelaksanaan Renja tahun berjalan, serta peninjauan kembali terhadap pencapaian Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD).

1.1 Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun untuk menyesuaikan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan, agar tetap relevan dengan kondisi aktual dan dinamika kebutuhan masyarakat. Perubahan Renja memuat revisi target kinerja, pembiayaan, serta penyesuaian program dan kegiatan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun melalui partisipasi masyarakat.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) RSUD Pakuhaji Kabupaten Tangerang Tahun 2025 ini disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2025 sampai dengan triwulan II, perubahan kebijakan, dan penyesuaian pagu anggaran, RPJMD, Rencana Strategis (Renstra) RSUD Pakuhaji Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029.

Secara hierarki, Perubahan Renja ini tetap mengacu pada dokumen perencanaan pembangunan daerah, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk kurun waktu 20 tahun, yang dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk kurun waktu 5 tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahunnya. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah, yang kemudian dijabarkan ke dalam Renja PD setiap tahun, termasuk penyusunan dokumen Perubahan Renja PD.

1.2 Landasan Hukum

Rencana kerja Rumah Sakit Umum Daerah Pakuhaji Kabupaten Tangerang Tahun 2025 dengan dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
5. Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Keputusan Presiden RI No. 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri dalam Negeri RI Nomor 1 tahun 2002 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja RSUD.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang;
14. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang Nomor 56 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2024
15. Keputusan Bupati Tangerang No. 445/KEP.113-Huk/2008 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum selaku penyelenggara Pola Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Kabupaten Tangerang;
16. Peraturan Bupati Nomor. 119 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Tangerang;
17. Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tangerang Nomor 17 Tahun 2009 Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang maka perlu ditetapkan Kebijakan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal;
18. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 38 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Pakuhaji Kabupaten Tangerang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang;
19. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026.
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TahunAnggaran 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rancangan awal rencana kerja (Renja) RSUD Pakuhaji Kabupaten Tangerang tahun 2025 disusun dengan maksud sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan RSUD Pakuhaji Kabupaten Tangerang terhadap suatu dokumen rencana tahunan di tahun 2025 yang sesuai dengan perkembangan serta perubahan situasi dan kondisi yang terjadi dalam waktu berjalan,serta sebagai pedoman untuk pelaksanaan kegiatan pada tahun 2025. Rancangan awal rencana kerja (Renja) RSUD Pakuhaji Kabupaten Tangerang tahun 2025 disusun dengan tujuan untuk :

a) Menjabarkan tujuan dan sasaran pembangunan serta program RSUD Pakuhaji Kabupaten Tangerang ke dalam arah kebijakan dan program pembangunan yang lebih rinci, terarah, terukur, dan dapat dilaksanakan selama tahun 2025;
b) Meningkatkan koordinasi, integrasi, sinergi, dan sinkronisasi peningkatan mutu pelayanan RSUD Pakuhaji Kabupaten Tangerang;
c) Menilai daya serap dan capaian target kinerja program/kegiatan yang mencakup masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) yang telah ditetapkan dalam dokumen Renja RSUD Pakuhaji Kabupaten Tangerang tahun 2025;
d) Diperolehnya program/kegiatan prioritas yang menjadi upaya konkrit untuk memenuhi kebutuhan pelanggan di tahun 2025 guna mewujudkan target dari visi dan misi RSUD Pakuhaji Kabupaten Tangerang.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyajian rancangan awal rencana kerja (Renja) RSUD Pakuhaji Kabupaten Tangerang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017. Adapun sistematikanya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) RSUD PAKUHAJI KABUPATEN TANGERANG TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah RSUD Pakuhaji Kabupaten Tangerang Tahun 2024

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2025

Realisasi anggaran pelaksanaan program/kegiatan RKPD RSUD Pakuhaji Kabupaten Tangerang tahun 2025 dari pagu anggaran sebesar Rp. 120.779.114.262,00 telah terealisasi sebesar Rp. 48.636.053.560,00 atau terserap sebesar 40,27%. Realisasi tersebut berasal dari Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp. 15.029.150.811,00, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah sebesar Rp. 1.392.291.750,00, Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sebesar Rp. 1.642.704.250,00, Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar Rp. 444.577.615,00, Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sebesar Rp. 6.523.117.425,00, Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD sebesar Rp. 14.193.882.847,00, kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 7.136.167.062,00, kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 2.241.371.800,00, dan kegiatan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Rp. 32.790.000,00. Faktor penyebabnya adalah dikarenakan harga pelatihan akreditasi dibawah nilai pagu yang terdapat di standar biaya umum, tentu saja hal ini sangat berpengaruh terhadap realisasi penyerapan anggaran yang menjadi kurang maksimal. Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) RSUD Pakuhaji Kabupaten Tangerang tahun berjalan 2025 sebagaimana tabel 2.1.

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.02	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Laporan Kinerja BLUD Puskesmas dan Rumah Sakit Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian, Umum, Jasa Penunjang dan Pemeliharaan Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan, Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100%**	**78%**	**100%**	**80%**	**84%**	**100%**	**50%**	**50%**
1.02.01.202	**ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH**	**Jumlah laporan keuangan**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**5 Laporan**	**2 Laporan**	**100%**
1.02.01.202.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan	130 Orang/Bulan	116 Orang/Bulan	153 Orang/Bulan	153 Orang/Bulan	100%	227 orang/bulan	227 orang/bulan	100%
1.02.01.206	**ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**60%**	**70%**	**70%**	**100%**	**100%**	**50%**	**100%**
1.02.01.206.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 paket	1 paket	100%
1.02.01.206.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 paket	1 paket	100%
1.02.01.206.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 paket	1 paket	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Penggandaan yang Disediakan								
1.02.01.206.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	4 paket	2 paket	50%
1.02.01.206.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100%	4 Laporan	2 laporan	50%
1.02.01.207	**PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**	**Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah**	**75%**	**75%**	**75%**	**75%**	**100%**	**100%**	**50%**	**50%**
1.02.01.209.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel	50 Unit	30 Unit	30 Unit	30 Unit	100%	227 unit	104 unit	100%
1.02.01.209.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	100%	2 unit	1 unit	50%
1.02.01.208	**PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Persentase pemenuhan jasa penunjang daerah**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**50%**	**50%**
1.02.01.208.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100%	4 Laporan	2 laporan	50%
1.02.01.208.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100%	4 Laporan	2 laporan	50%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.02.01.209	**PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Persentase Pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah**	**100%**	**75%**	**75%**	**75%**	**75%**	**100%**	**50%**	**50%**
1.02.01.209.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 Unit	7 Unit	7 Unit	7 Unit	100%	9 Unit	9 unit	90%
1.02.01.209.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 Unit	100 Unit	100 Unit	100 Unit	100%	230 unit	50 unit	33%
1.02.01.209.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	100%	2 unit	1 unit	50%
1.02.01.210	**PENINGKATAN PELAYANAN BLUD**	**persentase pemenuhan pelayanan BLUD**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**50%**	**50%**
1.02.01.210.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	100%	1 Unit Kerja	1 unit	100%
01.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase IndikatorNasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Persentase alat kesehatan**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**50%**	**50%**
1.02.02.201	**PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP**	**Fasilitas pelayanan kesehatan untuk ukm dan ukp memenuhi standar**	**70%**	**70%**	**70%**	**70%**	**70%**	**70%**	**50%**	**50%**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
1.02.02.201.014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	100%	137 unit	12 unit	100%
1.02.02.201.023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	2 Paket	2 Paket	100%
1.02.02.201.017	**PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persenatse penyediaan layanan kesehatan UKM dan UKP**	**80%**	**80%**	**80%**	**80%**	**80%**	**80%**	**40%**	**40%**
1.02.02.202	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	4 dokumen	2 Dokumen	50%
1.02.02.203.02	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang dikembangkan dan ditingkatkan Kompetensinya**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**75%**	**100%**	**50%**	**50%**
1 02 03.2.03.01	**PENGEMBANGAN MUTU DAN PENINGKATAN KOMPETENSI TEKNIS SUMBER DAYA MANUSIA**	**Persentase pemenuhan pengembangan dan peningkatan kompetensi**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**75%**	**100%**	**50%**	**50%**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	KESEHATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA									
1.02.03.203	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	25 Orang	25 Orang	25 Orang	25 Orang	100%	30 Orang	15 orang	50%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada Rumah Sakit Umum Daerah Pakuhaji Kabupaten Tangerang Tahun 2024 rata-rata mencapai target dengan indikator sangat baik. Pencapaian kinerja pelayanan SKPD sebagai implementasi Renstra SKPD dapat dilihat pada tabel sebagaimana terlampir pada lampiran 2.

NO	INDIKATOR	SPM/STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISA
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
1	Persentase Laporan Kinerja BLUD Puskesmas dan Rumah Sakit	80	70	25	80	81	82	43	80	82	83	
2	Pemenuhan Administrasi Kepegawaian, Umum, Jasa Penunjang dan Pemeliharaan	100	100	70	75	80	85	70	40	95	100	
3	Pemenuhan Administrasi Keuangan, Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	100	70	75	80	85	98	99	85	90	
4	Persentase IndikatorNasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit	80	100	70	75	80	85	80	81	85	90	
5	Persentase pemenuhan pengembangan dan peningkatan kompetensi	100	100	30	75	80	85	30	30	85	86	

Juga pada kinerja pendapatan rata-rata mencapai target tetapi ada beberapa yang tidak mencapai target dan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1.1. Kinerja Pelayanan

a. Penyebab GDR target < 45 realisasi mencapai 49,62 dengan analisa dalam penanganan pasien sudah keadaan kurang bagus dan keluarga sudah mencari ICU diluar (penuh) dan pasien membutuhkan penanganan khusus, sedangkan antrian ruangan intensif (ICU) di Rumah Sakit Umum Daerah Pakuhaji Kabupaten Tangerang masih menunggu.

b. Penyebab NDR target < 25 realisasi mencapai 32,01 dengan analisa minimnya perlengkapan diruangan perawat yang sifatnya emergency sedangkan pasien sudah keadaan kurang baik dan keluarga sudah mencari ICU diluar (penuh) dan pasien membutuhkan penanganan khusus sedangkan antrian ruangan intensif (ICU) di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang masih menunggu.

1.2. Pendapatan Pelayanan

Pendapatan BLUD pada Tahun 2024 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya dan melebihi capaian target. Target Pendapatan Rp.

31.686.500.000,- dengan realisasi Rp. 32.342.485.022.- atau sebesar 102,07%.

1.3. Biaya BLUD

Penggunaan biaya BLUD tidak mencapai target dari anggaran sebesar Rp. 47.919.323.407 dengan realisasi Rp. 36.329.159.324atau sebesar 75,80%, hal ini disebabkan efisiensi belanja BLUD tersebut sisa Anggarannya merupakan saldo kas yang dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan operasional Rumah Sakit Umum Daerah Pakuhaji Kabupaten Tangerang selama 6 (enam) bulan kedepan pada Tahun 2025.

1.4. Anggaran Belanja APBD

Penyerapan anggaran belanja APBD pada Tahun 2024 secara keseluruhan mencapai 87,44% dari pagu anggaran sebesar Rp. 124.525.202.453 terealisasi sebanyak Rp. 108.890.682.859.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu-isu penting pada penyelenggaraan tugas dan fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Pakuhaji Kabupaten Tangerang antara lain :

1) Kualitas dan kuantitas tenaga medis serta tenaga keperawatan memadai dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan perorangan pada rumah sakit kelas B, namun demikian Rumah sakit masih belum menerapkan secara keseluruhan dalam hal mendahulukan kepentingan pelanggan, kesinambungan dalam memberikan pelayanan, efektifitas, efesiensi dan kenyamanan kepada pasien.
2) Lokasi bangunan yang strategis & mudah dijangkau oleh masyarakat serta peralatan medis lengkap dan memadai namun belum didukung oleh Sistem Informasi Manajemen rumah sakit yang memadai dan area parkir masih belum memenuhi persyaratan sesuai standar.
3) Berkembangnya rumah sakit swasta sebagai kompetitor potensial yang memberikan pelayanan sejenis dan dengan adanya kebijakan pemerintah tentang asuransi kesehatan semesta yang dilaksanakan oleh BPJS yang menjamin seluruh masyarakat di Indonesia bisa mengurangi pangsa pasar jika Rumah Sakit Umum Daerah Pakuhaji Kabupaten Tangerang tidak mampu menyediakan pelayanan yang menyenangkan pelanggan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Realisasi anggaran program dan kegiatan RSUD Pakuhaji Tahun 2023 yang digunakan untuk Belanja operasi dengan pagu anggaran sebesar Rp. 85.721.480.434 telah terealisasi sebesar Rp. 75.152.267.799 atau sebesar 87,67 % sedangkan Belanja Modal dengan pagu anggaran Rp. 10.356.392.749 telah terealisasi sebesar Rp. 6.858.200.721 atau sebesar 66,22%.

Bahwa laporan pertanggungjawaban RSUD tahun 2023 menjadi masukan terhadap penyusunan Rancangan Awal RKPD RSUD Pakuhaji Kabupaten Tangerang tahun 2023. Tidak tercapainya penyerapan anggaran

pada Tahun Anggaran 2023 antara lain disebabkan adanya efisiensi anggaran belanja kegiatan, harga penawaran lebih tinggi dari satuan standar harga SIPD, Beberapa barang di E-Purchasing turun tayang, silpa tender dan kendala teknis lainnya. Solusi upaya peningkatan kinerja untuk perencanaan tahun 2025 dengan cermat dalam memperhitungkan kondisi-kondisi teknis dan efisiensi anggaran sehingga output dan outcome dapat tercapai sebagaimana target dalam Rencana Kerja RSUD Pakuhaji.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dari hasil Musrenbang Desa dan Musrenbang Kecamatan melalui Format F1 Kecamatan, untuk tahun anggaran 2024 tidak terdapat usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat untuk dilaksanakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Pakuhaji Kabupaten Tangerang, sehingga program dan kegiatannya secara umum bersifat tugas pokok fungsi OPD dan tidak pada aspek pemberdayaan masyarakat.

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
PROGRAM/KEGIATAN	**LOKASI**	**INDIKATOR KINERJA**	**TARGET**	**PAGU**	**PROGRAM/KEGIATAN**	**LOKASI**	**INDIKATOR KINERJA**	**TARGET**	**PAGU**
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**RSUD PAKUHAJI**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**RSUD PAKUHAJI**			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	RSUD PAKUHAJI				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	RSUD PAKUHAJI			
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	RSUD PAKUHAJI	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	130 Orang/Bulan	19.753.204.049	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	RSUD PAKUHAJI	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	153 Orang/Bulan	Rp30.908.638.092
Administrasi Umum Perangkat Daerah	RSUD PAKUHAJI				Administrasi Umum Perangkat Daerah	RSUD PAKUHAJI			
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	RSUD PAKUHAJI	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Rp522.040.728	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	RSUD PAKUHAJI	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Rp522.040.728
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	RSUD PAKUHAJI	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	306.297.813	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	RSUD PAKUHAJI	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Rp490.945.520
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	RSUD PAKUHAJI	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	266.171.266	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	RSUD PAKUHAJI	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Rp547.656.625
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	RSUD PAKUHAJI	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	100.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	RSUD PAKUHAJI	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	Rp120.000.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	RSUD PAKUHAJI	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	320.060.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	RSUD PAKUHAJI	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	Rp187.775.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	RSUD PAKUHAJI				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	RSUD PAKUHAJI			
Pengadaan Mebel	RSUD PAKUHAJI	Jumlah Mebel	40 Unit	180.206.961	Pengadaan Mebel	RSUD PAKUHAJI	Jumlah Mebel	40 Unit	Rp1.070.976.840
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	RSUD PAKUHAJI	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100 Unit	Rp2.769.491.660	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	150 Unit	Rp2.769.491.660

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
PROGRAM/KEGIATAN	**LOKASI**	**INDIKATOR KINERJA**	**TARGET**	**PAGU**	**PROGRAM/KEGIATAN**	**LOKASI**	**INDIKATOR KINERJA**	**TARGET**	**PAGU**
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**RSUD PAKUHAJI**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**RSUD PAKUHAJI**			
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	RSUD PAKUHAJI	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	1.992.090.165	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	RSUD PAKUHAJI	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	Rp5.391.284.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	RSUD PAKUHAJI				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	RSUD PAKUHAJI			
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	RSUD PAKUHAJI	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	1.999.995.700	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	RSUD PAKUHAJI	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	Rp1.999.999.931
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	RSUD PAKUHAJI	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	13.140.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	RSUD PAKUHAJI	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	Rp8.959.600.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	RSUD PAKUHAJI				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	RSUD PAKUHAJI			
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	RSUD PAKUHAJI	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 Unit	256.053.640	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	RSUD PAKUHAJI	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	9 Unit	Rp306.833.500
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	RSUD PAKUHAJI	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 Unit	271.370.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	RSUD PAKUHAJI	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 Unit	Rp523.694.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	RSUD PAKUHAJI	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	398.934.583	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	RSUD PAKUHAJI	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Rp2.318.453.000
Peningkatan Pelayanan BLUD	RSUD PAKUHAJI				Peningkatan Pelayanan BLUD	RSUD PAKUHAJI			

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
PROGRAM/KEGIATAN	**LOKASI**	**INDIKATOR KINERJA**	**TARGET**	**PAGU**	**PROGRAM/KEGIATAN**	**LOKASI**	**INDIKATOR KINERJA**	**TARGET**	**PAGU**
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**RSUD PAKUHAJI**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**RSUD PAKUHAJI**			
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	RSUD PAKUHAJI	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	20.000.000.000	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	RSUD PAKUHAJI	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	Rp46.150.704.105
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	RSUD PAKUHAJI			16.483.473.300	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	RSUD PAKUHAJI			
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	RSUD PAKUHAJI				Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	RSUD PAKUHAJI			
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	RSUD PAKUHAJI	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	4 Unit	800.000.000	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	RSUD PAKUHAJI	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	100 Unit	Rp11.159.652.720
Pengadaan Obat, Vaksin	RSUD PAKUHAJI	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	1 Paket	3.000.000.000	Pengadaan Obat, Vaksin	RSUD PAKUHAJI	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	2 Paket	Rp15.562.551.694
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	RSUD PAKUHAJI				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	RSUD PAKUHAJI			
Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	RSUD PAKUHAJI	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	4 Dokumen	4.500.500.000	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	RSUD PAKUHAJI	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	4 Dokumen	Rp5.000.092.000
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	RSUD PAKUHAJI			155.400.000	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	RSUD PAKUHAJI			

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
PROGRAM/KEGIATAN	**LOKASI**	**INDIKATOR KINERJA**	**TARGET**	**PAGU**	**PROGRAM/KEGIATAN**	**LOKASI**	**INDIKATOR KINERJA**	**TARGET**	**PAGU**
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**RSUD PAKUHAJI**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**RSUD PAKUHAJI**			
Pengembangan Mutu dan peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	RSUD PAKUHAJI				Pengembangan Mutu dan peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	RSUD PAKUHAJI			
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	RSUD PAKUHAJI	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	25 Orang	155.400.000	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	RSUD PAKUHAJI	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	30 Orang	Rp109.790.000

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN, maupun yang terkait dengan pembangunan daerah provinsi yang perlu dicermati terkait pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Pakuhaji Kabupaten Tangerang antara lain reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang kesehatan dan penanggulangan kemiskinan, namun demikian Rumah Sakit Umum Daerah Pakuhaji Kabupaten Tangerang belum melaksanakan telaahan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan provinsi tersebut.

Tabel 3.1
Identifikasi Kebijakan Nasional dan Provinsi
Rumah Sakit Umum Daerah Pakuhaji Kabupaten Tangerang

No.	Kebijakan Nasional/Provinsi	Sumber	Keterangan
A	Nasional		
1.	Nihil		
B.	Provinsi		
1.	Nihil		

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Dalam Rencana Strategis Bisnis Rumah Sakit Umum Daerah Pakuhaji Kabupaten Tangerang Tahun 2024 – 2026 telah ditetapkan visi dan misi Kabupaten Tangerang disusun selaras dengan tujuan dan sasaran pembangunan pemerintah Kabupaten Tangerang (RPJMD) sebagai berikut:

Visi Kabupaten Tangerang : "Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Tangerang yang Religius, Cerdas, Sehat dan Sejahtera"

Misi Kabupaten Tangerang yang ditetapkan adalah :

1. **Tangerang Religi** : Meningkatkan peranan nilai-nilai agama dalam kehidupan bermasyarakat menuju masyarakat yang religius.
2. **Tangerang Tangguh** : Meningkatkan akses, mutu dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas dan sehat.
3. **Tangerang Mapan** : Mengembangkan ekonomi daerah yang kompetetif dan inovatif.
4. **Tangerang Tangkas** : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan dan akuntabel.
5. **Tangerang Mantap** : Meningkatkan pemerataan pembangunan insfrastruktur yang berkelanjutan dan mengelola lingkungan hidup berdasarkan rencana tata ruang wilayah.

6. **Tangerang Kreatif** : Mengembangkan inovasi daerah dalam rangka meningkatkan kualitas daya saing daerah, masyarakat dan pelaku pembangunan lainnya.

Rumah Sakit Umum Daerah Pakuhaji Kabupaten Tangerang mengacu kepada Misi kedua Kabupaten Tangerang yaitu Meningkatkan Akses, Mutu dan Pemerataan Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan untuk Mewujudkan Masyarakat yang Cerdas dan Sehat dengan Tujuan, Sasaran dan program telah ditetapkan pada Rencana Strategis Bisnis 2024-2028 dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan. Didalam Rencana Kerja ditetapkan capaian seluruh indikator sasaran dan kegiatan.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Dengan dirumuskannya tujuan ini maka Rumah Sakit Umum Daerah Pakuhaji Kabupaten Tangerang telah mengetahui apa yang harus dilaksanakan dan kondisi yang akan dicapai dalam kurun waktu satu tahun.

Sasaran merupakan penjabaran dari masing-masing misi dan tujuan yang telah ditetapkan, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Pakuhaji Kabupaten Tangerang pada tahun 2025 melalui serangkaian program dan kegiatan.

Tujuan dan sasaran dalam Rencana Kerja (Renja) Rumah Sakit Umum Daerah Pakuhaji Kabupaten Tangerang pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tujuan :

Meningkatkan kualitas pelayanan Rumah Sakit sesuai standar Nasional Akreditasi.

Sasaran:

1. Meningkatnya kinerja pelayanan di Rumah Sakit.
2. Meningkatkan akuntabilitas kinerja OPD.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka diperlukan adanya strategi atau cara pencapaian tujuan yang dipilih secara tepat agar dapat meningkatkan kinerja organisasi. Strategi dan Kebijakan untuk mencapai misi Rumah Sakit Umum Daerah Pakuhaji Kabupaten Tangerang adalah sebagai berikut:

TABEL 3.2
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN PROGRAM
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PAKUHAJI KABUPATEN TANGERANG
2024

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan kualitas pelayanan Rumah Sakit sesuai standar Nasional Akreditasi	1. Meningkatnya kinerja pelayanan di Rumah Sakit	Tingkatkan kinerja pelayanan melalui peningkatan kompetensi, perubahan perilaku petugas yang mengedepankan pasien ditunjang dengan sistem informasi Rumah Sakit yang terintegrasi	1. Meningkatkan kompetensi SDM melalui diklat
			2. Meningkatkan perilaku petugas sehingga memberikan pelayanan yang berpusat pada pasien
			3. Mengembangkan sistem informasi Rumah Sakit yang terintegrasi
	2. Meningkatkan akuntabilitas kinerja OPD	Tingkatkan kinerja Rumah Sakit dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai dari APBN, APBD dan Rumah Sakit	1. Meningkatkan pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai dari APBN
			2. Meningkatkan pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai dari APBD
			3. Meningkatkan pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai dari Rumah Sakit (BLUD)

3.2 Program dan Kegiatan

Rumah Sakit Umum Daerah Pakuhaji Kabupaten Tangerang telah menetapkan program prioritas yang dianggap penting baik bersifat strategis maupun operasional. Program tersebut sejalan dengan RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2028, dalam hal ini terkait dengan Misi Kedua yaitu Tangerang Tangguh “Meningkatkan akses, mutu dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas dan sehat” dan Misi Keempat yaitu ”Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan dan akuntabel”, dalam mengantisipasi pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Tangerang, Rumah Sakit Umum melaksanakan Program dan Kegiatan, sebagai berikut:

Tabel 3.3

PROGRAM DAN KEGIATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PAKUHAJI KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (RP)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	
											NASIONAL	DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		RSUD PAKUHAJI						Rp138.826.522.646				
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						Rp138.826.522.646				
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						Rp138.826.522.646				
1,	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan RSUD Persentase Laporan Kinerja BLUD Bidang Kesehatan Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Dinas Kesehatan***	-			**100 Persen 100 Persen 100 Persen**	Rp103.564.936.232				
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan*	-			5 Dokumen	Rp30.952.425.948			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi	Meningkatkan Kualitas tata kelola pemerintahan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (RP)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	
											NASIONAL	DAERAH
											Pelayanan Publik	
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				227 Orang/bulan	Rp30.952.425.948	Kab. Tangerang, Pakuhaji, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas tata kelola pemerintahan
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			1 Dokumen	Rp1.833.721.248			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Meningkatkan Kualitas tata kelola pemerintahan
	1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga										

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (RP)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	
											NASIONAL	DAERAH
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	Rp522.040.728	Kab. Tangerang, Pakuhaji, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Meningkatkan Kualitas tata kelola pemerintahan
	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor										
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	Rp490.945.520	Kab. Tangerang, Pakuhaji, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Meningkatkan Kualitas tata kelola

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (RP)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	
											NASIONAL	DAERAH
												pemerintahan
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan										
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	Rp547.520.000	Kab. Tangerang, Pakuhaji, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas tata kelola pemerintahan
	1.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan										
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	Rp120.000.000	Kab. Tangerang, Pakuhaji, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas tata kelola pemerintahan
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	Rp153.215.000	Kab. Tangerang, Pakuhaji, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan	Meningkatkan Kualitas Reformasi

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (RP)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	
											NASIONAL	DAERAH
											Transformasi Pelayanan Publik	Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Meningkatkan Kualitas tata kelola pemerintahan
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Tersedianya Laporan barang milik daerah*	-			1 Dokumen	Rp10.519.504.500			Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Meningkatkan Kualitas tata kelola pemerintahan
	1.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						Rp1.070.976.840				
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				50 Unit		Kab. Tangerang, Pakuhaji,	PENDAPATAN ASLI	Memperkuat Stabilitas Polhukhan	Meningkatkan Kualitas Reformas

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (RP)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	
											NASIONAL	DAERAH
									Semua Kel/Desa	DAERAH (PAD)	kam Dan Transformasi Pelayanan Publik	i Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Meningkatkan Kualitas tata kelola pemerintahan
	1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				30 Unit	Rp2.769.491.660	Kab. Tangerang, Pakuhaji, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Meningkatkan Kualitas tata kelola pemerintahan
	1.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana										

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (RP)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	
											NASIONAL	DAERAH
		Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				4 Unit	Rp6.679.036.000	Kab. Tangerang, Pakuhaji, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Meningkatkan Kualitas tata kelola pemerintahan
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah dokumen Jasa Penunjang*	-			1 Dokumen	Rp10.959.599.931			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (RP)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	
											NASIONAL	DAERAH
												Meningkatkan Kualitas tata kelola pemerintahan
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	Rp1.999.999.931	Kab. Tangerang, Pakuhaji, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Meningkatkan Kualitas tata kelola pemerintahan
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa				4 Laporan	Rp8.959.600.000	Kab. Tangerang, Pakuhaji,	PENDAPATAN ASLI	Memperkuat Stabilitas Polhukhan	Meningkatkan Kualitas Reformas

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (RP)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	
											NASIONAL	DAERAH
			Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan						Semua Kel/Desa	DAERAH (PAD)	kam Dan Transformasi Pelayanan Publik	i Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Meningkatkan Kualitas tata kelola pemerintahan
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			1 Dokumen	Rp3.148.980.500			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas tata kelola pemerintahan
	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan				9 Unit	Rp306.833.500	Kab. Tangerang, Pakuhaji, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transforma	Meningkatkan Kualitas tata kelola

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (RP)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	
											NASIONAL	DAERAH
			dibayarkan Pajak dan Perizinannya								si Pelayanan Publik	pemerintahan
	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				150 Unit	Rp523.694.000	Kab. Tangerang, Pakuhaji, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Meningkatkan Kualitas tata kelola pemerintahan
	1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	Rp2.318.453.000	Kab. Tangerang, Pakuhaji, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi	Meningkatkan Kualitas tata kelola

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (RP)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	
											NASIONAL	DAERAH
											Pelayanan Publik	pemerintahan
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Persentase BLUD yang melakukan pelayanan dan penunjang pelayanan*	-			100 Persen	Rp46.150.704.105			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Meningkatkan Kualitas tata kelola pemerintahan
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD										
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	Rp46.150.704.105	Kab. Tangerang, Pakuhaji, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Meningkatkan Kualitas

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (RP)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	
											NASIONAL	DAERAH
												tata kelola pemerintahan
2,	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	***Persentase Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Persentase alat kesehatan memenuhi standar***	**-**			**93 Persen 81 Persen**	Rp31.722.296.414				
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota*	-			100 Persen	Rp26.722.204.414			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing SDM Meningkatkan SDM yang Berdaya Saing
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan										
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan				120 Unit	Rp11.159.652.720	Kab. Tangerang, Pakuhaji, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing SDM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (RP)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	
											NASIONAL	DAERAH
			Kesehatan yang Disediakan								Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatk an SDM yang Berdaya Saing
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan										
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				2 Paket	Rp15.562.551.694	Kab. Tangerang, Pakuhaji, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatk an Kualitas dan Daya Saing SDM Meningkatk an SDM yang Berdaya Saing
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Ketersediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*	-			100 Persen	Rp5.000.092.000			Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	Meningkatk an Kualitas dan Daya Saing SDM Meningkatk an SDM yang

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (RP)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	
											NASIONAL	DAERAH
											Berdaya Saing	Berdaya Saing
	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit										
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit				4 Dokumen	Rp5.000.092.000	Kab. Tangerang, Pakuhaji, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing SDM Meningkatkan SDM yang Berdaya Saing
3,	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	***Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya***	**-**			**100 Persen**	**Rp109.790.000**				
	1.02.03.2.02	Perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan SDMK untuk UKM dan UKP di Kab/Kota									Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing SDM Meningkatkan SDM yang

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (RP)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	
											NASIONAL	DAERAH
												Berdaya Saing
	1.02.03.2.02 000 2	Pemenuhan sumber daya manusia kesehatan sesuai standar	Jumlah sumber daya manusia kesehatan sesuai standar				96 orang	Rp3.429.500.000				
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang dikembangkan dan ditingkatkan Kompetensinya*	-			100 Persen	Rp109.790.000			Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatk an Kualitas dan Daya Saing SDM Meningkatk an SDM yang Berdaya Saing
	1.02.03.2.03. 0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya				30 Orang	Rp109.790.000	Kab. Tangerang, Pakuhaji, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	Meningkatk an Kualitas dan Daya Saing SDM Meningkatk an SDM yang

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (RP)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	
											NASIONAL	DAERAH
											Berdaya Saing	Berdaya Saing
	J U M L A H							**Rp138.826.522.646**				

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DERAH

Rencana Kerja dan Pendanaan Rumah Sakit Umum Daerah Pakuhaji Kabupaten Tangerang pada Tahun Anggaran 2025 dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.1

Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Pakuhaji Kabupaten Tangerang Tahun 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (RP)	LOKASI	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		RSUD PAKUHAJI						Rp138.826.522.646		
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						Rp138.826.522.646		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						Rp138.826.522.646		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1,	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan RSUD Persentase Laporan Kinerja BLUD Bidang Kesehatan Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Dinas Kesehatan***	-			**100 Persen 100 Persen 100 Persen**	Rp103.564.936.232		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan*	-			5 Dokumen	Rp30.952.425.948		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (RP)	LOKASI	SUMBER DANA
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				227 Orang/bulan	Rp30.952.425.948	Kab. Tangerang, Pakuhaji, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			1 Dokumen	Rp1.833.721.248		
	1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	Rp522.040.728	Kab. Tangerang, Pakuhaji, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	Rp490.945.520	Kab. Tangerang, Pakuhaji, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	Rp547.520.000	Kab. Tangerang, Pakuhaji, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (RP)	LOKASI	SUMBER DANA
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	Rp120.000.000	Kab. Tangerang, Pakuhaji, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	Rp153.215.000	Kab. Tangerang, Pakuhaji, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Tersedianya Laporan barang milik daerah*	-			1 Dokumen	Rp10.519.504.500		
	1.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						Rp1.070.976.840		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				50 Unit		Kab. Tangerang, Pakuhaji, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				30 Unit	Rp2.769.491.660	Kab. Tangerang, Pakuhaji, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (RP)	LOKASI	SUMBER DANA
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				4 Unit	Rp6.679.036.000	Kab. Tangerang, Pakuhaji, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah dokumen Jasa Penunjang*	-			1 Dokumen	Rp10.959.599.931		
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	Rp1.999.999.931	Kab. Tangerang, Pakuhaji, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	Rp8.959.600.000	Kab. Tangerang, Pakuhaji, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			1 Dokumen	Rp3.148.980.500		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (RP)	LOKASI	SUMBER DANA
	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				9 Unit	Rp306.833.500	Kab. Tangerang, Pakuhaji, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				150 Unit	Rp523.694.000	Kab. Tangerang, Pakuhaji, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	Rp2.318.453.000	Kab. Tangerang, Pakuhaji, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Persentase BLUD yang melakukan pelayanan dan penunjang pelayanan*	-			100 Persen	Rp46.150.704.105		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (RP)	LOKASI	SUMBER DANA
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD								
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	Rp46.150.704.105	Kab. Tangerang, Pakuhaji, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD
2,	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	***Persentase Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Persentase alat kesehatan memenuhi standar***	**-**			**93 Persen 81 Persen**	Rp31.722.296.414		
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota*	-			100 Persen	Rp26.722.204.414		
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan								
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				120 Unit	Rp11.159.652.720	Kab. Tangerang, Pakuhaji, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (RP)	LOKASI	SUMBER DANA
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan								
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				2 Paket	Rp15.562.551.694	Kab. Tangerang, Pakuhaji, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Ketersediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*	-			100 Persen	Rp5.000.092.000		
	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit								
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit				4 Dokumen	Rp5.000.092.000	Kab. Tangerang, Pakuhaji, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3,	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	***Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan***	**-**			**100 Persen**	**Rp109.790.000**		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (RP)	LOKASI	SUMBER DANA
			Mutu dan Kompetensinya							
	1.02.03.2.02	Perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan SDMK untuk UKM dan UKP di Kab/Kota								
	1.02.03.2.02 0002	Pemenuhan sumber daya manusia kesehatan sesuai standar	Jumlah sumber daya manusia kesehatan sesuai standar				96 orang	Rp3.429.500.000		
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang dikembangkan dan ditingkatkan Kompetensinya*	-			100 Persen	Rp109.790.000		
	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya				30 Orang	Rp109.790.000	Kab. Tangerang, Pakuhaji, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	J U M L A H							**Rp138.826.522.646**		

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan Rumah Sakit Umum Daerah Pakuhaji Kabupaten Tangerang Tahun 2025 merupakan Agenda Tahunan Rumah Sakit Umum Daerah Pakuhaji Kabupaten Tangerang yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025 dalam kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 dan Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Pakuhaji Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029 serta prioritas pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

Rencana Kerja ini memuat uraian pokok-pokok kebijakan dan indikator-indikator capaian kinerja yang terukur, diharapkan dapat menjadi pedoman dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Pakuhaji Kabupaten Tangerang dan sebagai acuan dalam pelaksanaan program/kegiatan dan anggaran Tahun 2025 pada seluruh unit kerja di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Pakuhaji Kabupaten Tangerang.

BUPATI TANGERANG,

MOCHAMMAD MAESYAL RASYID